SALINAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam rencana strategis periode sebelumnya serta memperhatikan isu strategis daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II

PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tujuan;

b. sasaran;

c. program;

d. kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

e. anggaran yang bersifat indikatif,

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan:

a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

b. APBD Tahun 2026; dan

c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027-2030.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;

d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

e BAB V : PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 5

(1) Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu anggaran dapat disesuaikan tanpa mengubah dokumen Renstra Perangkat Daerah secara menyeluruh dengan mendasarkan pada hasil evaluasi tahunan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan melalui penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 47

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkah, dan rahmat, serta hidayah-Nya lah dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dapat diselesaikan.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai implementasi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib.

Secara subdtansial, program dan kegiatan yang terkandung dalam Renstra ini mengacu dalam Renstra kebijakan (RPJMD) tahun 2025-2029 sebagai arah pembangunan Kota Yogyakarta lima tahun ke depan. Pada level vertikal, Renstra ini disusun berorientasi pada Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelompokkan menjadi tiga, yang meliputi: (1)pemerataan dan penguatan akses, (2)peningkatan mutu dan daya saing, (3)peningkatan tata kelola dan pencitraan publik, dan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga yang dikelompokkan menjadi tiga, yang meliputi: (1)kepemudaan, (2)keolahragaan dan (3)kepramukaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini. Semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen ini bermanfaat.

Yogyakarta,
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Yogyakarta

Budi Santosa Asrori, S.E,.M.Si.
NIP 19700915 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 5

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Pd 5
B Sumber Daya Pd 10
C Kinerja Pelayanan Pd 13
D Kelompok Sasaran Layanan
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
A Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 20
B Isu Strategis 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
3.1 Tujuan Renstra Pd Tahun 2025-2029 35
3.2 Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029 35

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 39

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

4.2 Program Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 serta berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai kontrak politik Wali Kota terpilih.

Dari hasil evaluasi Renstra 2020–2024, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan dan ditingkatkan, seperti pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, partisipasi dan kreativitas pemuda, serta prestasi olahraga yang belum optimal. Permasalahan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan Renstra 2025–2029 agar lebih fokus, terarah, dan berbasis pada isu strategis daerah.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 serta Renstra Dindikpora DIY tahun 2022-2027, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpora tahun 2020-2024.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025–2029 dari aspek pendidikan, kepemudaan, dan olahraga dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025–2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program

4.2 Uraian kegiatan

4.3 Uraian sub kegiatan, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian sub kegiatan mendukung prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogakarta adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
    1. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
    1. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
e. Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
    2. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
f. Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas:
    1. Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    2. Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan.
g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
    1. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

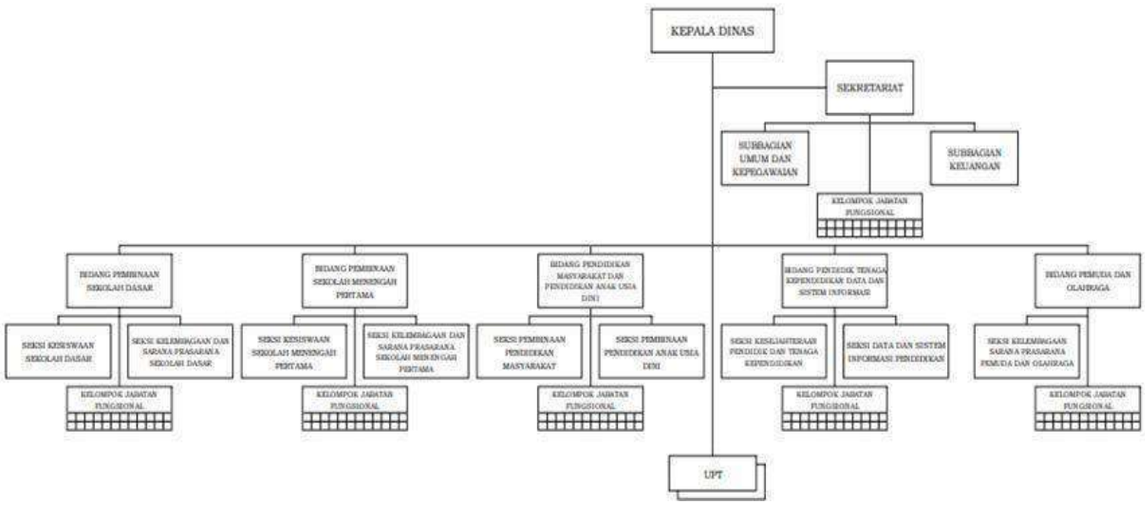

1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai **fungsi**:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. pemerintahan Dinas;
f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. pemerintahan Dinas;

Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi dinas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sekolah menengah pertama;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pendidikan;
10. Pengoordinasian fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pasukan pengibar bendera pusaka;
11. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi upt dinas;
12. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
13. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada dinas;
14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan dinas;
15. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
16. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi dinas;
17. Pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan;
18. Pengoordinasianpelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dinas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dengan adanya peraturan terebut maka telah disusun Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Yograkarta dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, maka perlu disusun Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Pembentukan Tim Kerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Adapun Tata Kerja Tim Kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

a. Menyusun perencanaan kinerja (menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja);

b. Membagi dan menunjuk Pejabat Administrator sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja;

c. Memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan

d. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas.

2. Penanggung Jawab

a. Merumuskan strategi pencapaian target kinerja;

b. Menetapkan, memberikan arahan, dan klarifikasi ekspektasi target kinerja;

c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;

d. Melakukan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dan pemberian umpan balik kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana;

e. Menerima hasil pelaksanaan tugas;

f. Melakukan reviu hasil pelaksanaan tugas;

g. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah; dan

h. Menerima hasil reviu dan memberikan arahan penyesuaian.

3. Ketua Tim Kerja

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;

b. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

c. Membagi peran anggota tim;

d. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;

e. Melakukan pertemuan berkala/ sewaktu-waktu dan pemberian umpan balik kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana;

f. Menyesuaikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan ke Penanggung Jawab.

4. Anggota

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;

c. Menyesuaikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

d. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Kerja

1.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. **Kepegawaian**

Jumlah pegawai yang tertuang dalam tabel, merupakan rekap pegawai Dinas, UPT dan Satuan Pendidikan

Tabel 1.1 Komposisi jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	ESELON II A	1
2	SEKRETARIS	STRUKTURAL	ESELON III A	1
3	KEPALA BIDANG	STRUKTURAL	ESELON III B	5
4	KA SUBBAG DAN KA SEKSI	STRUKTURAL	ESELON IV A	18
5	KA TATA USAHA	STRUKTURAL	ESELON IV B	2
6	PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK	FUNGSIONAL	-	7
7	PENGAWAS SEKOLAH DASAR	FUNGSIONAL	-	9
8	PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	FUNGSIONAL	-	6
9	PENILIK	FUNGSIONAL	-	2
10	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL	-	2
11	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	16
12	JABATAN PELAKSANA	-	-	48
13	PPPK DINAS			14
14	PPPK			750
	GURU			645
	NON GURU			105
14	PPPK Paruh Waktu			395
15	JLOP DINAS DAN SATUAN PENDIDIKAN	-	-	1274
16	TENAGA KEAMANAN	-	-	13
17	TENAGA KEBERSIHAN	-	-	10
18	OUTSOURCING	-	-	3
19	PENDIDIK			1.110
20	TENAGA KEPENDIDIKAN			63
	JUMLAH			**3,749**

Sumber data: analisa data pegawai dindikpora (rekap data pegawai Dindikpora)

Perlengkapan Sarana dan Prasarana

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menempati lahan seluas 3.870 m2 dengan luas bangunan 1.350 m2 dengan satu Masjid dengan Luas 128 m2 dan memiliki infrastruktur yang memadai, baik dari segi lahan, transportasi, fasilitas kantor, hingga peralatan teknologi. Seluruh sarana dicatat dalam kondisi baik, yang berarti terawat dan siap pakai, adapun rincian sasaran dan prasarana yang tertuang dalam tabel merupakan data Dinas, UPT dan satuan pendidikan, berikut rinciannya:

Tabel 1.2 Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	3.870	meter 2	
2	Gedung	1.350	meter 2	baik
3	Masjid	1	lokal	baik
4	Bus	1	buah	baik
5	Mobil	6	buah	baik
6	Sepeda Motor	75	buah	baik
7	Filing cabinet	144	buah	baik
8	Kursi Rapat	397	buah	baik
9	Junifer Router	1	buah	baik
10	Kursi Bundar	2	buah	baik
11	Kursi Tamu	12	buah	baik
12	Kulkas	2	buah	baik
13	Kompor Gas	2	buah	baik
14	Tabung Gas	4	buah	baik
15	Almari TI	1	buah	baik
16	CPU/Router	14	buah	baik
17	AP Phone	7	buah	baik
18	LCD Projector	15	buah	baik
19	Kamera DSLR	1	buah	baik
20	Laptop	38	buah	baik
21	Wireless Sound	8	buah	baik
22	Amplifier	4	buah	baik
23	Meja TV	1	buah	baik
24	Scanner	4	buah	baik
25	Msn pemotong kertas	1	buah	baik
26	Faximile	2	buah	baik
27	Meja Telephone	2	buah	baik
28	Televisi	9	unit	baik
29	Papan Pengumuman	4	buah	baik
30	Rak Besi	96	unit	baik
31	Whiteboard	25	buah	baik
32	Meja TL	25	buah	baik
33	Kamera Camcorder HC-MDH2/Panasonic	1	buah	baik
34	Rak Kayu	7	buah	baik
35	Cash Box	2	buah	baik
36	Brangkas	4	buah	baik

37	Kursi Lipat	530	buah	baik
38	Zice	9	buah	baik
39	UPS	24	buah	baik
40	PC Server	5	buah	baik
41	Telephone	4	buah	baik
42	Tiang Bendera	4	buah	baik
No	**Nama Barang**	**Jumlah**	**Satuan**	**Keterangan**
43	Megaphon	5	buah	baik
44	Sound system	14	set	baik
45	Printer	104	buah	baik
46	Mesin Ketik	4	buah	baik
47	Meja Rapat	159	buah	baik
48	Speaker Portable	3	buah	baik
49	Meja Komputer	158	buah	baik
50	Meja Kerja	120	buah	baik
51	Kursi Rotan	5	buah	baik
52	PC	194	buah	baik
53	Genset	1	buah	baik
54	Dispenser	10	buah	baik
55	Handy Talky	4	buah	baik
56	Vacuum Cleaner Numetic	2	buah	baik
57	Tempat Tidur UKS	3	buah	baik
58	Kipas Angin	60	buah	baik
59	AC	18	unit	Baik
60	Monitor LED	14	unit	baik
61	Digital Running Text	3	buah	Baik
62	Tangga lipat 2m	3	buah	Baik
63	Tangga lipat 3m	1	buah	Baik
64	Kompresor	1	buah	Baik
65	Gergaji mesin	1	unit	Baik
66	Gerobak Sorong	1	unit	Baik
67	Mesin Antrian	1	unit	Baik
68	Kamera Digital	1	unit	Baik
69	Toolkit Perbengkelan	1	set	Baik
70	Mesin Cuci Kendaran	1	unit	Baik
71	Microphone Kabel	12	unit	Baik
72	Microphone Table	12	unit	Baik

Sumber: Data Inventaris Aset Dindikpora Kota Yogyakarta

1.1.3 Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kondisi Pendidikan di Kota Yogyakarta lima tahun terakhir sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Siswa Lima Tahun terakhir

Tabel 1.3
Keadaan Siswa Lima Tahun Terakhir

Jumlah siswa peserta didik di jenjang pendidikan formal/non formal di Kota Yogyakarta

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPA	-	826	723	811	619
KB	-	1.424	1.209	1.297	1.273
SPS	-	4.394	3.494	2.711	2.211
TK/RA	11.597	11.684	14.667	14.357	9.543
SD/MI	42.429	46.112	39.548	39.051	38.274
Paket A	265	16	4	11	361
SMP/MTs	23.207	23.598	23.904	23.321	23.556
Paket B	530	86	59	86	625
Paket C	925	141	155	207	831
Jumlah	78.953	88.281	83.763	81.852	77.293

Sumber Data: Data Pokok Pendidikan Dindikpora

Jumlah peserta didik di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Kota Yogyakarta dan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta semakin berkurang , selain itu juga karena adanya pemerataan kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.

Perkembangan Jumlah Satuan Pendidikan / Lembaga

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Lembaga Lima Tahun Terakhir

Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan /Lembaga														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
TK/RA	4	3	7	9	345	354	11	519	530	11	475	486	11	239	250
SD	89	74	163	89	75	164	89	76	165	89	76	165	87	75	162
MI	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4
SMP	16	42	58	16	42	58	16	42	58	16	42	58	16	42	58
MTs	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	7
Jumlah Formal	**111**	**128**	**239**	**116**	**471**	**587**	**118**	**646**	**764**	**118**	**602**	**720**	**116**	**365**	**481**
Jenjang	**Jumlah Satuan Pendidikan / Lembaga**														
	2020			**2021**			**2022**			**2023**			**2024**		
	N	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**
PKBM/SKB	1	20	21	1	18	19	1	17	18	1	17	18	1	17	18
TPA		40	40		40	40		40	40		79	79		38	38
KB		80	80		80	80		78	78		37	37		72	72
SPS		368	368		349	349		180	180		140	140		118	118
Jumlah	**1**	**508**	**509**	**1**	**487**	**488**	**1**	**315**	**316**	**1**	**273**	**274**	**1**	**245**	**246**

Non Formal															
Total	**112**	**636**	**748**	**117**	**968**	**1075**	**119**	**961**	**1080**	**119**	**875**	**994**	**117**	**610**	**727**

Sumber Data: Data Pokok Pendidikan Dindikpora

Peningkatan tajam jumlah satuan pendidikan dari 2021 ke 2022, khususnya pada jenjang TK/RA, SD, dan lembaga non-formal seperti SPS, mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperluas layanan pendidikan Upaya pemulihan dan penguatan sektor pendidikan pasca-pandemi Fenomena ini juga bisa menjadi indikator positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata.

Sejalan dengan penurunan jumlah siswa, jumlah satuan pendidikan/lembaga pendidikan formal juga mengalami penurunan. Untuk menanggulangi terjadi penurunan jumlah siswa, maka tugas satuan pendidikan untuk mempersiapkan strategi dan berinovasi dalam memperkenalkan dan mempromosikan sekolahnya ke masyarakat baik disekitar sekolah maupun melalui orangtua wali dengan cara penguatan citra satuan pendidikannya dengan banyak program dan kegiatan unggulannya atau memberikan informasi atas keunggulan sekolahnya. Sedangkan untuk satuan pendidikan/lembaga pendidikan non formal jumlahnya meningkat, karena dalam satuan pendidikan non formal banyak menampung siswa yang putus sekolah dan siswa yang tidak melanjutkan di pendidikan formal.

Perkembangan Angka Putus Sekolah

Tabel 1.5
Perkembangan Angka Putus Sekolah Lima Tahun Terakhir

Tahun	SD/MI	SMP/MTs
2020	1	10
2021	3	5
2022	4	5
2023	0	2
2024	2	4

Sumber data: hasil pendataan internal Dindikpora

Jumlah angka putus sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada masa pandemi covid 19, dimana saat itu diberlakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran di rumah, dan berimbas sampai saat ini. Sehingga menyebabkan banyak anak yang sudah merasa nyaman tidak bersekolah, salah satu alasan tidak bersekolah atau tidak ingin melanjutkan

bersekolah bukan dikarenakan faktor ekonomi atau tidak ada biaya, namun dikarenakan faktor sosial, faktor keluarga yang kurang peduli terhadap pentingnya pendidikan.

Adapun upaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menindaklanjuti data anak tidak/putus sekolah yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan edukasi kepada anak maupun orang tuanya untuk dapat kembali melanjutkan bersekolah di sekolah non formal (PKBM/SKB). Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah dalam rangka mewujudkan wajib belajar 13 tahun.

Dalam menangani anak tidak sekolah atau putus sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat menyelesaikan sendiri, perlu kolaborasi bekerjasama dengan OPD teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan lembaga terkait, mengingat kasus anak tidak sekolah atau putus sekolah bermacam macam kasusnya, yaitu dengan wilayah (RT, RW, Kelurahan), Badan Narkotika Nasional (BNN), Puskesmas, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah, Pendamping Jam Belajar Masyarakat (JBM).

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, diperlukan suatu standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya, guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan meliputi partisipasi dan pemerataan Peserta Didik, kualitas hasil belajar Peserta Didik, untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik, serta kualitas dan pemerataan layanan pada satuan pendidikan.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, Data yang diukur terkait pelayanan dasar SPM pada Urusan Pendidikan antara lain data Angka Partisipasi, data Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Data Kualitas Hasil Belajar, Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi, data Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta Data Kualitas Lingkungan Belajar.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik diukur melalui perhitungan kemampuan literasi Peserta Didik, kemampuan numerasi Peserta Didik, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik diukur melalui perhitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan, perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi, perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan, dan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan diukur melalui perhitungan indeks iklim keamanan, dan indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

Perluasan dan pemerataan peserta didik adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Perluasan peserta didik mencakup upaya untuk memperluas akses dan kesempatan pendidikan diwilayah Kota Yogyakarta, termasuk di daerah atau di sisi selatan Kota Yogyajarta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah kelas di satuan pendidikan sisi utara, dan menambah jumlah kelas di satuan pendidikan sisi selatan, memberikan bantuan finansial untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerataan peserta didik berarti mengurangi kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesempatan belajar antara individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang sama bagi semua siswa, memberikan bantuan dan dukungan khusus untuk siswa yang membutuhkan, serta menyediakan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Perluasan dan

pemerataan peserta didik sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata. Hal ini juga memiliki dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan kemampuan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan.

Sasaran Aksesibilitas pendidikan dapat diukur tujuh (7) indikator, yaitu, APM SD, APM SMP, APK SD, APK SMP, APS SD, APS SMP, APS PAUD, adapun capaian indikator dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik. 1.1 Capaian APM dan APK SD dan SMP

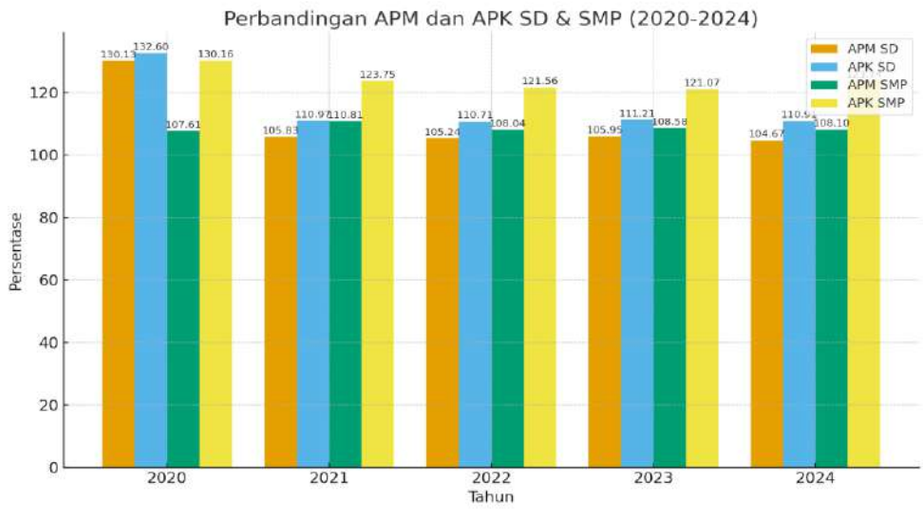

Grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian APM dan APK jenjang SD dan SMP mengalami Kenaikan dan Penurunan, adapun penjelasan terkait alasan ketidak tercapain sebagai berikut:

1. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

   Angka Partisipasi Murni (APM) Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

   Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan SD dan SMP di tahun 2020-2024 mengalami naik turun, meskipun capaiannya lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator dalam pemenuhan APM yang perlu dilakukan perbaikan, seperti indeks pemenuhan guru, peningkatan kompetensi guru, updating data melalui dapodik di satuan pendidikan, namun capaian ini tidak berdampak

langsung pada pemenuhan standart SPM, yaitu bahwa semua anak usia sekolah semua bersekolah baik di sekolah formal maupun non formal.

2. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APK di wilayah tersebut. APK adalah persentase siswa yang bersekolah dengan tidak memandang usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK menunjukkan partisipasi sekolah penduduk bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK di suatu jenjang pendidikan didapat dengan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Sddan SMP sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat (7-15 tahun).

Perkembangan APK menurut jenjang pendidikan SD dan SMP di tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan, meskipun capaian lebih dari 100%, namun masih ada beberapa indikator yang masih perlu di perbaiki dan tingkatkan. Meskipun demikian, hal ini tidak mempengaruhi pemenuhan hak anak atau penduduk untuk bersekolah.

3. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada indikator APS usia 5-6 tahun hanya tersedia mulai tahun 2022.

Grafik 1.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Yogyakarta

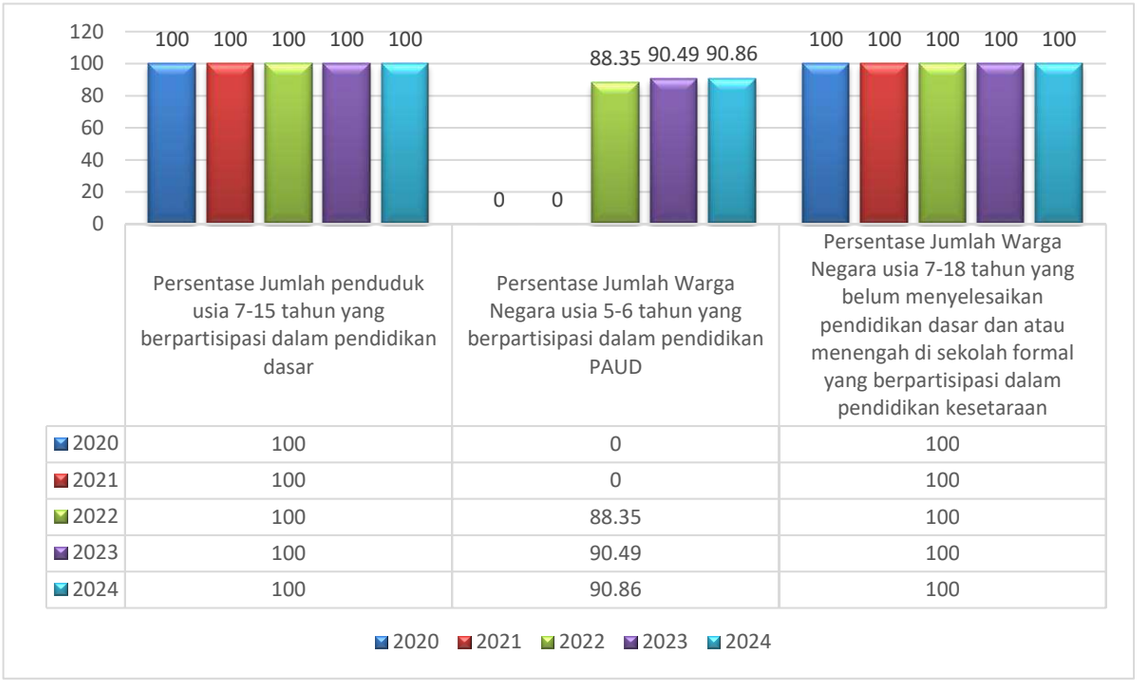

	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
2020	100	0	100
2021	100	0	100
2022	100	88.35	100
2023	100	90.49	100
2024	100	90.86	100

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama lima tahun terakhir menunjukan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Yogyakarta tingkat kepedulian terhadap pentingnya pendidikan sudah cukup baik.

Sedangkan untuk APS usia 5-6 tahun selama tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan capaian dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan usia dini belum menjadi keharusan, sehingga masih ada beberapa orang tua menyekolahkan anaknya langsung ke jenjang sekolah dasar. Harapannya dengan adanya kebijakan pendidikan wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun sebelum pendidikan dasar dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun.

Kondisi Mutu dan Kualitas Hasil Belajar Peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar merupakan tujuan utama dari pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat bersaing secara global dan menjadi pribadi yang mandiri serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Implementasi kurikulum yang efektif: Kurikulum yang efektif akan membantu siswa untuk belajar lebih baik dan memperoleh hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum secara terus-menerus agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

2. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang bervariasi: Dalam pembelajaran, perlu digunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk memfasilitasi proses belajar. Metode dan media yang variatif akan membantu siswa untuk lebih tertarik dan memahami materi pelajaran dengan baik.
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik: Guru yang berkualitas akan mampu membimbing siswa dalam belajar dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi guru agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam mengajar.
4. Pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik: Selain fokus pada aspek akademik, perlu juga fokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, seperti moral dan etika.
5. Evaluasi dan monitoring hasil belajar secara terus-menerus: Evaluasi dan monitoring hasil belajar secara terus-menerus akan membantu pihak sekolah untuk mengetahui kualitas hasil belajar yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta dan menghasilkan peserta didik yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Capaian Literasi dan Numerasi

Berdasar Hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek meliputi dua aspek penting dalam pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi.

Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tertulis dan non-tertulis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dalam asesmen nasional, literasi dan numerasi diukur melalui tes yang dirancang khusus oleh Kemdikbudristek. Tes tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diberikan kepada peserta didik di

berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Hasil dari tes tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi dan numerasi peserta didik serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran. Dalam mengukur literasi, tes yang diberikan mencakup berbagai aspek, antara lain pemahaman bacaan, menulis, berbicara, dan mendengarkan.

Sedangkan dalam mengukur numerasi, tes yang diberikan mencakup berbagai konsep matematika, seperti operasi hitung, aljabar, geometri, dan statistik. Setelah dilakukan asesmen nasional, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik dalam literasi dan numerasi. Kemudian, hasil tersebut akan menjadi acuan bagi pihak sekolah dan guru untuk merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik akan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka, sehingga dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Adapun capaian literasi dan numerasi dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Grafik 1.3. Capaian Literasi dan Numerasi Hasil Rapor Pendidikan Jenjang SD dan SMP di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

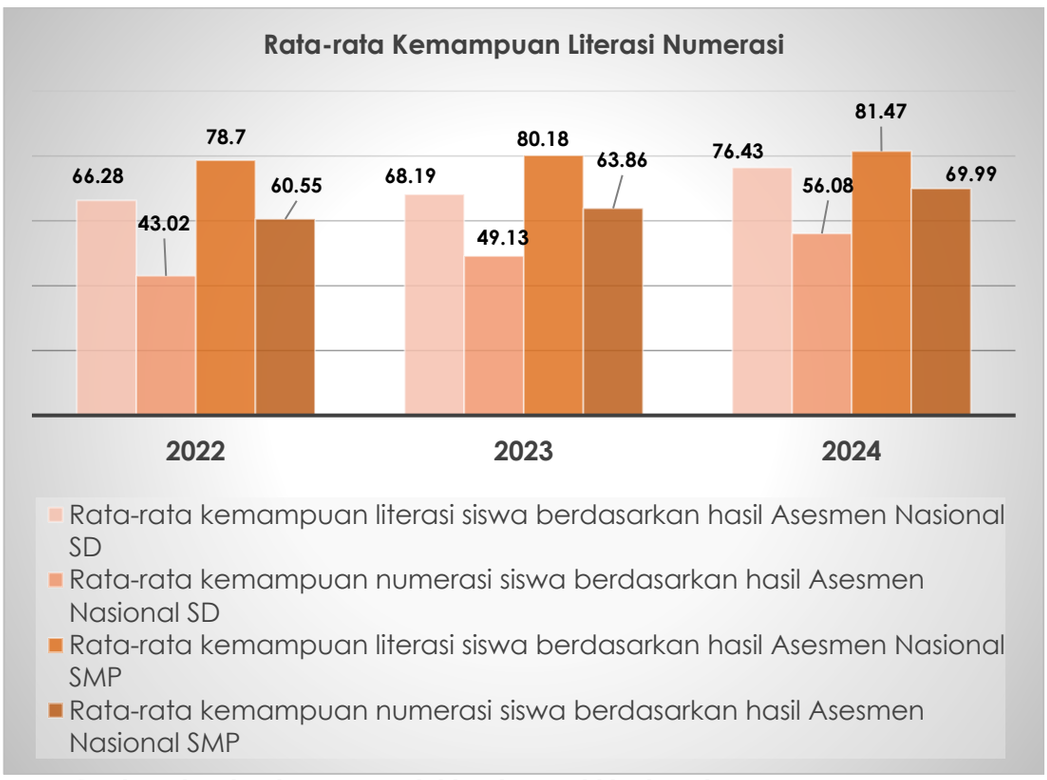

Sumber: data hasil raport pendidikan kemendikbudristek

Berdasarkan data capaian literasi dan numerasi hasil asesmen nasional di Kota Yogyakarta untuk jenjang SD dan SMP, dapat dikatakan bahwa rata-rata peserta didik memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Data capaian literasi di Kota Yogyakarta dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikkan, menunjukkan bahwa rata-rata

peserta didik memiliki kemampuan literasi yang cukup baik, dengan skore antara 0-100. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik di Kota Yogyakarta memiliki kemampuan literasi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sementara itu, capaian numerasi Kota Yogyakarta dari tahun 2022-2024 juga mengalami kenaikkan, menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang cukup baik, dengan skore yang sama antara 0-100. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik di Kota Yogyakarta memiliki kemampuan numerasi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kota Yogyakarta. Hasil asesmen nasional dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah dan guru untuk meningkatkan program pembelajaran dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Selain itu, hasil asesmen nasional juga dapat menjadi acuan bagi pihak pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Tolok ukur dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tahun 2020 diukur berdasarkan persentase kelulusan jenjang SD/Mi dan SMP/MTs, dimana persentase kelulusan ditargetkan sebesar 100%, dan tercapai 100%. Sedangkan di tahun 2022, tolok ukur dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di ukur berdasarkan Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY dan Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY, dimana ditargetkan meraih peringkat 2 pada rerata ujian sekolah, dan pada saat itu dapat meraih peringkat 1 pada rerata ujian sekolah se- DIY.

Perkembangan Mutu Pendidikan

Tabel 1.6
Perkembangan Angka Melanjutkan Lima Tahun Terakhir

Jenjang		Tahun				
	%	2020	2021	2022	2023	2024
Ke SMP/MTs	%	63.40	107.93	107.93	112.73	115.31
Ke SMA/K/A	%	155.77	122.24	155.77	155.77	122.24

Angka melanjutkan mengalami naik turun setiap tahunnya. Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa angka melanjutkan ke jenjang SMP mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa besarnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan dasar sebagai bekal untuk ke jenjang lebih tinggi, sedangkan untuk angka melanjutkan dari jenjang SMP ke jenjang SMA mengalami naik turun, hal ini

disebabkan banyak faktor dan alasan untuk tidak melanjutkan je jenjang lebih tinggi. Namun meski demikian angka melanjutkan masih lebih besar dari 100% dimana hal ini menunjukkan mobilitas penduduk yang besar.

Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kekurangan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) akan menjadi permasalahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Meskipun PTK di Kota Yogyakarta memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi pendidik yang profesional dan berkualitas, penurunan jumlah PTK akan sangat berdampak pada pemenuhan layanan pendidikan.

Kompetensi PTK dan ASN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tidak perlu diragukan, namun seiring berjalannya waktu, ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan volume pekerjaan yang terus bertambah setiap tahunnya akan terjadi dan mulai mempengaruhi kinerja dan mutu layanan pendidikan itu sendiri. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar memerlukan informasi mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Latar Belakang Pendidikan D4/S1 (Tahun 2020-2024)

No	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2020	2021	2022	2023	2024
		Latar Belakang Pendidikan				
		D4/S1	D4/S1	D4/S1	D4/S1	D4/S1
1	Jenjang TK/PAUD		1417	1325	1344	1204
2	Jenjang SD/MI	2572	2618	2631	2753	2450
3	Jenjang SMP/MTs	1467	1470	1461	1540	1300
4	PKBM		186	188	191	101
5	SKB		18	22	25	23
	Jumlah	4039	5709	5627	5853	5.078

Sumber Data: Dapodik Dindikpora

Bersadarkan data tersebut diatas, dapat dilihat jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut latar belakang pendidikan, dimana ada sekitar 65 % guru dan tenaga kependidikan sudah sesuai kualifikasi D4/S1, namun masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum sesuai kualifiasi D4/S1 sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk dapat melanjutkan pendidikan.

Perkembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024, adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Perkembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TK/RA	1.241	1.471	1.621	1.609	1.024
SD/MI	2.674	2.392	2.411	2.612	2.427
SMP/MTs	1.744	1.364	1.394	1.775	1.650

Secara umum jumlah guru memiliki trend yang stabil selama lima tahun, akan tetapi untuk jumlah guru TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs secara agregat mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor pensiun, pendistribusian guru (mutasi), kebijakan rekrutmen yang tidak pasti, atau perubahan jumlah peserta didik.

Perkembangan Kondisi Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memiliki 460 sekolah negeri dan swasta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupaya semua sekolah dalam kondisi baik dan layak pakai, mulai dari bangunan gedung, sarana prasananya, berikut perkembangan kondisi fisik sekolah di Kota Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam tabel;

Tabel 1.9 Perkembangan Kondisi Fisik Sekolah

Tahun	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	TK/RA
	% Kondisi Ruang Kelas Baik		
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100

Sumber data: Dapodik Dindikpora

Secara umum kondisi satuan pendidikan di Kota Yogyakarta berada pada kondisi baik. Dan dinas secara rutin melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan maupun sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan, dengan memastikan kondisi bangunan dalam kondisi baik dan layak di pergunakan, serta sarana prasarana di satuan pendidikan terpenuhi.

Ketersediaan Aplikasi dan pengembangan Aplikasi Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki bidang yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pendidikan dan olahraga. Aplikasi pendidikan yang dikelola yaitu Pengembangan SIM Aplikasi Pendataan PPDB Online, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Konsultasi Belajar Siswa (SIM KBS), Pengembangan SIM *backbone*, Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan, pemeliharaan aplikasi data pokok pendidikan (DAPODIK), Pengembangan SIM Aplikasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Pengembangan SIM Aplikasi sibosda, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga (SIGASPOL), pemeliharaan *Software*/Lisensi Pengembangan Aplikasi, pengelolaan *website* Dinas, sosial media dinas (*Whatshap,Instagram,Youtube*)

Didalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, membentuk tim pengelola website dinas, tim pengelolah aplikasi di masing masing bidang. Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan sosialisasi aplikasi, bimtek pengelolaan *website*.

Kondisi Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Pengelolaan kepemudaan dan olahraga di suatu daerah sangat penting untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan kepemudaan dan olahraga penting:

1. Meningkatkan Kesehatan Fisik dan Mental: Olahraga adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kegiatan olahraga dapat membantu mencegah berbagai penyakit, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.

2. Mengembangkan Bakat Olahraga: Melalui pengelolaan olahraga yang baik, daerah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat olahraga yang ada di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga dan membuka peluang bagi atlet untuk berkarier di tingkat nasional maupun internasional.

3. Mendorong Kemandirian dan Kepemimpinan: Pengelolaan kepemudaan dan olahraga dapat membantu mendorong kemandirian dan kepemimpinan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan seperti program mentoring dan pelatihan kepemimpinan, generasi muda dapat belajar mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama dalam tim.

4. Meningkatkan Pariwisata: Pengelolaan olahraga yang baik dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata. Daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang baik dan prestasi olahraga yang mengesankan dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang dan mengunjungi daerah tersebut.

5. Meningkatkan Kualitas Hidup: Kegiatan olahraga dan kepemudaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mengurangi risiko penyakit dan stres, olahraga juga dapat membantu mengurangi perilaku buruk, seperti kecanduan narkoba dan alkohol.

Dalam rangka memanfaatkan hal tersebut, pengelolaan kepemudaan dan olahraga harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah yang lebih luas. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi olahraga setempat untuk membangun infrastruktur olahraga yang memadai, menyediakan pelatihan dan program mentoring untuk generasi muda, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Kepemudaan

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah salah satu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemajuan

dan perkembangan pemuda dalam suatu negara atau wilayah. IPP terdiri dari sejumlah variabel seperti tingkat pendidikan, kesehatan, keterlibatan sosial, ekonomi, dan keamanan. IPP didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan dan kesejahteraan

pemuda. Melalui pengukuran IPP, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki kebijakan dan program yang berhubungan dengan pemuda. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pengukuran IPP, antara lain:

1. Pendidikan: Tingkat pendidikan pemuda adalah salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan pemuda. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat.

2. Kesehatan: Kesehatan fisik dan mental adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda. Oleh karena itu, IPP juga memperhitungkan tingkat kesehatan dan akses ke layanan kesehatan.

3. Keterlibatan sosial: Keterlibatan sosial adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda karena dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan membuat perubahan positif.

4. Ekonomi: Peningkatan ekonomi adalah hal penting bagi pemuda karena dapat membantu meningkatkan kemampuan finansial dan meningkatkan kemandirian.

5. Keamanan: Keamanan adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas.

Setelah variabel-variabel tersebut dihitung dan dinilai, akan diperoleh nilai IPP. Nilai IPP yang lebih tinggi menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam pembangunan pemuda. Dalam prakteknya, IPP dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan dan harapan pemuda dalam suatu negara atau wilayah. Selain itu, IPP juga dapat membantu pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kemajuan dan perkembangan pemuda dari waktu ke waktu.

Keolahragaan

Sport Development Index (SDI) adalah salah satu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan perkembangan olahraga dalam suatu negara atau wilayah. SDI mengevaluasi kemajuan dan perkembangan dalam olahraga melalui beberapa indikator seperti

partisipasi, kebijakan, fasilitas, investasi, prestasi, dan lain-lain. SDI mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pengukuran, yaitu:

1. Partisipasi: Aspek partisipasi meliputi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai atlet, pelatih, maupun penggemar. Indikator-partisipasi meliputi jumlah atlet, klub olahraga, acara olahraga, dan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga.

2. Kelembagaan: Aspek kelembagaan meliputi kebijakan, regulasi, dan lembaga terkait olahraga. Indikator kelembagaan meliputi struktur organisasi, program olahraga, kebijakan pemerintah, dan dukungan finansial dari pemerintah atau pihak swasta.

3. Prestasi: Aspek prestasi meliputi pencapaian atlet dan tim olahraga dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. Indikator prestasi meliputi jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan olahraga, prestasi individu dan tim, dan sejarah prestasi olahraga suatu negara

Perkembangan Organisasi Pemuda yang Aktif Lima Tahun terakhir

Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami pengurangan dan penambahan, di tahun 2024 ada penambahan satu organisasi dari tahun 2023, dimana pemuda aktif berdasarkan kreteria usia 16-30 Tahun. Adapun data perkembangan organisasi pemuda aktif sebagai berikut:

Tabel 1.10

Perkembangan Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif
2020	32
2021	36
2022	36
2023	34
2024	35

Berdasarkan data tersebut diatas, hal ini dikarenakan kurangnya Regenerasi dengan alasan Organisasi kepemudaan seringkali kesulitan menarik anggota baru secara konsisten. Ketika anggota lama lulus atau sibuk dengan kehidupan pribadi/profesional,

tidak ada cukup anggota baru yang mengisi kekosongan, menyebabkan penurunan jumlah anggota secara keseluruhan. Kurangnya Kaderisasi: Organisasi seringkali gagal dalam proses kaderisasi, yaitu melatih dan mempersiapkan pemimpin masa depan. Akibatnya, ketika pemimpin lama dan mengalami pergeseran keanggotaan, tidak ada suksesor yang siap mengambil alih, menyebabkan kekosongan kepemimpinan dan tidak ada pergantian anggota organisasi.

Faktor-faktor yang mendukung ketertarikan SDM pemuda dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi untuk kemajuan wilayahnya serta mencari pengalaman berorganisasi dan menghambat kurangnya SDM yang berminat untuk berorganisasi serta berkurangnya minat dalam berorganisasi karena memiliki kesibukan lain misalnya bekerja atau merantau ke luar daerah.

Adapun data organisasi pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta berjumlah 35 organisasi, yaitu:

Tabel. 1.11 Data Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan

JUMLAH PEMUDA (USIA 16-30 TAHUN) YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	Jenis Organisasi		Anggota Aktif (16 – 30 Th)	Keterangan
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
1	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama		49	
2	Himpunan Mahasiswa Islam		700	
3	Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta		49	
4	Gerakan Pemuda Ansor		200	
5	Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Djazman Al Kindi		26	
6	Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR. Fakhruddin		24	
7	Forum Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta		40	
8	Satuan Siswa Pelajar Dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Yogyakarta		55	
9	Kata Kota Jogja		61	
10	Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta		100	
11	Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Yogyakarta		30	
12		Senkom Mitra Polri Kota Yogyakarta	50	
13	Forum Pemuda Nusantara		15	
14		Forum Kerukunan Umat Beragama Muda Kota Yogyakarta	40	
15	Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta		47	
16	Pemuda Wilayah Kota Yogyakarta		25	
17	Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta		54	
18		Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri 1201 Kota Yogyakarta	130	
19	DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Yogyakarta		23	
20	Junior Chamber International Yogyakarta		32	
21	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta		500	
22	Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kota Yogyakarta		500	
23	JOGTA Kota Yogyakarta		35	
24	DPD Barisan Pemuda Nusantara Kota Yogyakarta		1.100	
25	Paguyuban Dimas Diajeng Jogja		30	
26	BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Yogyakarta		45	
27		Forum Anak Kota (FAKTA)	45	
28	Insan Muda Cerdas		20	
29	Purna Prakarya Muda Indonesia Kota Yogyakarta		15	
30		Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Kota Yogyakarta	52	
31	Purna Paskibraka Indonesia Kota Yogyakarta		40	
32		Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta	17	
33	PD Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Yogyakarta		200	
34		Badan Koordinator Daerah Forum Kader Bela Negara Kota Yogyakarta	22	
35	Forum Komunikasi Orkestra Pelajar (FKOP) Kota Yogyakarta		30	
	JUMLAH	-	4.371	

Perkembangan Wirausaha Muda

Perkembangan wirausaha muda di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan atau event yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan wirausahawan muda yang berpotensi baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang belum memiliki usaha sendiri, yaitu melalui pelatihan maupun bimtek kewirausahaan (*Yogya Entrepreneur School Of Busines Ouwnership*), jumlah perkembangan wirausaha muda di Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.12

Perkembangan Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Wirausaha Muda
2020	150
2021	180
2022	1090
2023	1094
2024	1120

Perkembangan Organisasi Olahraga Lima Tahun terakhir

Perkembangan organisasi olahraga di Kota Yogyakarta jika dilihat dari lima tahun terakhir khususnya untuk atlit yang mendapat pembinaan dan yang berprestasi mengalami peningkatan. Untuk jumlah pelatih yang memiliki setifikat masih belum ada penambahan, mengingat syarat menjadi seorang pelatih memerlukan keahlian khusus untuk mendapatkan sertifikat, adapun rincian data sebagai berikut:

Tabel 1.13

Jumlah Pelatih yang bersertifikasi

Tahun	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi
2020	154
2021	154
2022	154
2023	154
2024	154

Secara umum pelatih di Kota Yogyakarta semua sudah bersertifikat, sesuai dengan kualifikasi jenis cabang olahraganya.

Namun untuk menambah jumlah pelatih sesuai dengan cabang olahraga dan sudah bersertifikat yang masih menjadi kendala, karena perlu keahlian khusus dan menyesuaikan dengan cabagng olahraga yang ada.

Tabel 1.14

Pembinaan Atlit Muda di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah atlit pelajar yang dibina
2020	338
2021	102
2022	132
2023	239
2024	275

Secara umum jumlah atlit pelajar yang di bina setiap tahunnya bertambah, atlit pelajar mendapat pembinaan dan pendampingan melalui Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang melekat pada SMP N 13 Yk, kegiatan Sentra Pembinaan Olahraga Muda (SPOM), dimana pada siswa dilatih mengembangkan bakat kemampuannya untuk menjadi calon atlit profesional, dan siap mengikuti kejuaraan baik tingkat kota sampai tingkat propinsi.

Tabel 1.15

Atlit Berprestasi di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Atlit berprestasi
2020	0
2021	0
2022	12
2023	38
2024	54

Secara umum jumlah atlet yang berprestasi setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan dan diikuti karena masa pandemi Covid 19, sehingga tidak dapat menilai atlet yang berprestasi,sehingga di tahun 2020 dan 2021 berjumlah 0.

Data tersebut menunjukkan bahwa prestasi olahraga di Kota Yogyakarta mengalami **peningkatan signifikan dan konsisten sejak tahun 2022**. Dari tidak ada atlet berprestasi menjadi **54 atlet pada tahun 2024**, perkembangan ini mencerminkan adanya **kemajuan nyata, keberlanjutan pembinaan, serta peluang besar untuk mencetak lebih banyak atlet unggul di masa depan.**

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021-2022

VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Baseline	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022	
								Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Tujuan Daerah 3.1 Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta													
Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	70.00	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga; Keaktifan organisasi (data dari kecamatan)	Review 2021						
							(40% Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 40% Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif + 20% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan)dikali 100	85.00	88	88.86	91.96	99.00	98.06
							Sumber Data :	85.00	88	88.86	91.96	99.00	98.06
							Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	93%	93%	92%	98.57%	100%	100.00%
							Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	77%	82%	97%	92.31%	100%	100.00%
							Persentasi peningkatan efektivitas bagi kepramukaan	0%	0%	66.30%	78.05%	95.00%	90.32%

Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai	II	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY dihitung dari perbandingan Rerata Ujian Sekolah Daerah antara lima kabupaten/kota se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai	-	-	Peringkat 2	Peringkat 1	Peringkat 1	Peringkat 1
	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai	I	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY dihitung dari perbandingan Rerata Ujian Sekolah Daerah antara lima kabupaten/kota se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai	-	-	Peringkat 2	Peringkat 1	Peringkat 1	Peringkat 1
				Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	Angka partisipasi kasar SD dihitung dari jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun, dikalikan 100%	$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah siswa SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$	135.81%	132.60%	135.90%	110.97%	110-143%	110.71
							RPJMD	~~142.70%~~	-	~~142.73%~~	-	~~142.76%~~	-
							Review 2018	~~136.42%~~	-	~~136.44%~~	-	~~136.46%~~	-
							Review 2019	~~142.70%~~	-	~~142.73%~~	-	~~142.76%~~	-
							Review 2020	135.81%	132.60%	135.90%	-	~~142.76%~~	-
							Review 2021	-	-	135.90%	110.97%	~~142.76%~~	-
							Perubahan RKPD 2022	-	-	-	-	110-143%	110.71
							Sumber data :	135.81%	132.60%	135.90%	110.97%	#VALUE!	110.71%
							Jumlah siswa SD	42,981	42,429	43,051	40,226	-	39.548
							Jumlah penduduk usia 7 - 12	31,648	31,998	31,678	36,250	-	35.722

					Angka partisipasi kasar SMP	Angka partisipasi kasar SMP dihitung dari jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun, dikalikan 100%	$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$	133.80%	130.16%	133.92%	123.75%	123-142%	121.56
							RPJMD	~~141.31%~~	-	~~141.39%~~	-	~~141.50%~~	-
							Review 2018	~~139.17%~~	-	~~139.19%~~	-	~~139.21%~~	-
							Review 2019	~~141.31%~~	-	~~141.39%~~	-	~~141.50%~~	-
							Review 2020	133.80%	130.16%	133.92%	-	~~141.50%~~	-
							Review 2021	-	-	133.92%	123.75%	~~141.50%~~	-
							Perubahan RKPD 2022	-	-	-	-	123-142%	121.56
							Sumber data :	133.80%	130.16%	133.92%	123.75%	#VALUE!	121.56%
							Jumlah siswa SMP	23,592	23,207	23,612	24,024	-	23.904
							Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	17,632	17,830	17,632	19,413	-	19.665
					Angka partisipasi murni SD	Angka partisipasi murni SD dihitung dari jumlah siswa SD usia 7 - 12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dikalikan 100%	$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah siswa SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$	127.68%	130.13%	130.16%	105.83%	105-131%	105.24
							RPJMD	~~129.04%~~	-	~~129.06%~~	-	~~129.06%~~	-
							Review 2018	~~120.38%~~	-	~~120.40%~~	-	~~120.40%~~	-
							Review 2019	~~129.04%~~	-	~~129.06%~~	-	~~129.06%~~	-
							Review 2020	127.68%	130.13%	~~127.81%~~	-	~~129.06%~~	-
							Review 2021	-	-	130.16%	105.83%	~~130.21%~~	-
							Perubahan RKPD 2022	-	-	-	-	105-131%	105.24
							Sumber data :	127.68%	130.13%	130.16%	105.83%	#VALUE!	105.24%
							Jumlah siswa SD usia 7 - 12 tahun	40,408	41,639	41,668	38,364	-	37.593
							Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	31,648	31,998	32,012	36,250	-	35.722

					Angka partisipasi murni SMP	Angka partisipasi murni SMP dihitung dari jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dikalikan 100%	APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun/Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun) x 100%	106.40%	107.61%	107.68%	110.81%	107.89%	108.04
							RPJMD	~~106.29%~~	-	~~106.35%~~	-	~~106.40%~~	-
							Review 2018	~~111.85%~~	-	~~111.86%~~	-	~~111.87%~~	-
							Review 2019	~~106.29%~~	-	~~106.35%~~	-	~~106.40%~~	-
							Review 2020	106.40%	107.61%	~~106.35%~~	-	~~106.40%~~	-
							Review 2021	-	-	107.68%	110.81%	107.89%	108.04
							Sumber data :	106.40%	107.61%	107.68%	110.81%	107.89%	108.04%
							Jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun	18,760	19,186	19,199	21,511	19,303	21.246
							Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	17,632	17,830	17,830	19,413	17,892	19.665
					Angka partisipasi sekolah	Angka partisipasi sekolah dihitung dari Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah, dikalikan 100%	$APS = \frac{\text{jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100
							RPJMD	~~95.10%~~	-	~~95.15%~~	-	~~95.15%~~	-
							Review 2020	99.99%	99.99%	~~100.00%~~	-	~~100.00%~~	-
							Review 2021	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100
							Sumber data :	99.99%		100.00%	100.00%	#VALUE!	100.00%
							Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah	49,276	49,821	49,278	59,875	-	37.593
							Jumlah penduduk usia sekolah	49,280	49,828	49,280	59,875	-	37.593

Tabel 1.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2023-2024

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

Misi 1 : Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan

Misi 3 : Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		2024		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Berdasarakan permendikbudristekdikti nomor 32 tahun 2022, Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)	Kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD = rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan	Skor		53.94	91.58	77.28	76.43	98.90%
		Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)	dikurangi rerata nilai literasi semua							

		Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%							
			RPD							
			Review 2024	Skor		-	-	77.28	76.43	98.90%
			Sumber Data:							
			Hasil rapor pendidikan	Nilai	51,39 nilai	53.94	91.58	77.28	76.43	-

	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	Kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD = rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Skor		40.27	77.33	57.77	56.07	97.06%
			RPD							

			Review 2024	Skor		-	-	57.77	56.07	97.06%
			Sumber Data:							97.06%
			Hasil rapor pendidikan			40.27	77.33	57.77	56.07	-
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	Kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP= rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan	Skor		63.12	93.59	88.2	84.62	95.94%

			bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%							
			RPD							
			Review 2024			-	-	88.2	84.62	95.94%
			Sumber Data:							
			Hasil rapor pendidikan	Nilai	60,10 nilai	63.12	93.59	88.2	84.62	95.94%
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	Kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP = rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen	Skor		54.80	76.90	83.39	73.15	87.72%

			Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%							
			RPD							
			Review 2024			-	-	83.39	73.15	87.72%
			Sumber Data:							
			Hasil Rapor Pendidikan	Skor		54.80	76.90	83.39	73.15	-
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	**Review 2023**									
	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dihitung dari jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 %	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar = (Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi	Persentase	100 %	100%	100.00%	100%	100.00%	100%

		dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100 %							
		Sumber Data:			-	100.00%	-	100.00%	-
		Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			-	54790	-	53546	-
		Jumlah penduduk usia 7-15 tahun			-	54790	-	53546	-
RPD									
Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dihitung dari jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100 %	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x100%	Persentase	88.35 %	88.66%	90.49%	88.85%	90.86%	102.26%
		Sumber Data:				90.49%		90.86%	
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD				9745		9863	

		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan				10769		10855	
Review 2024									
Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan = (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota	Persentase	100 %	-	-	100%	100%	100%

		yang bersangkutan) x 100%							
		Sumber Data:	-	-	-	-	-	100%	-
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan		-	-	-	-	-	-
RPD									

Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan = (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun) x 100%	Persentase	100 %	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%
		Sumber Data:							
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			-	1270	-	1481	-

			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun			-	1270	-	1481	-
Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**Review 2023**									
	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	Persentase kapasitas pemuda, olahraga dan kepramukaan yang aktif dihitung dari tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan, persentase kapasitas daya saing keolahragaan, dan persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif dihitung dari = (10% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan + 20% Persentase kapasitas daya saing keolahragaan + 70% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan) dikali 100	Persentase	84.81	88.95	89.37	90.25	89.39	99.05%
			Review 2024			-	-	90.25	89.39	99.05%
			Sumber Data:		84.81	88.95	89.37	90.25	89.39	99.05%
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan		50.39	58.17	64.59	67.11	66.47	

			kegiatan organisasi kepemudaan							
			Persentase kapasitas daya saing keolahragaan		82.72	83.00	64.54	67.68	63.73	
			Persentasi peningkatan efektivitas bagi kepramukaan		90.32	95.05	100	100	100	
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30) Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomer 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomer 9 karena tidak mengamanatkan RB level OPD sehingga disempurnakan dengan Kepwal.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	AA	100.38%
			Review 2023		Nilai	A	A	A	-	-
			Review 2024			-	-	A	AA	100.38%
			Sumber Data:							
			Hasil penilaian RB Dindikpora oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian		87.74		92.31		90.341	

			persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik							

Tabel 1.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta (Tahun 2020-2024)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Persentase Kelulusan SD/MI	100%
		Persentase kelulusan SMP/MTs	100%
2	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	135.81%
		Angka partisipasi kasar SMP	133.80%
		Angka partisipasi murni SD	127.68%
		Angka partisipasi murni SMP	106.40%
		Angka partisipasi sekolah	99.99%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output**	**100,00 %**	**22.524.013.258,00**	**100% %**	**22.524.013.258,00**	**100% %**	**21.696.653.052,00**	**100,00%**	**96,33%**
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				167.915.000,00	100,00%	167.915.000,00	100,00%	148.914.675,00	100,00%	88,68%
			Rapat Koordinasi yang		450 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
			Laporan Perjalanan Dinas		25 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.356.098.258,00	100,00%	22.356.098.258,00	100,00%	21.547.738.377,00	100,00%	96,38%
			Benda POS yang tersedia		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa Pengiriman/paket		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
			STNK kendaraan dinas yang		81 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa kebersihan kantor		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa Keamanan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Alat tulis kantor yang		63 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa Percetakan		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa Penggandaan		1.100.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan		23 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Bahan bacaan/surat kabar		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Bahan Perpustakaan		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Peralatan rumah tangga		40 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa KIR kendaraan		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pembayaran telepon		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pemeliharaan taman		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa Tenaga Pendukung		753 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**92,53%**
				Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan**	**jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai**	**100,00 %**	**1.012.055.569,00**	**100% %**	**1.012.055.569,00**	**100% %**	**963.066.531,00**	**100,00%**	**95,16%**
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				841.215.569,00	100,00%	841.215.569,00	100,00%	836.760.129,00	100,00%	99,47%
			Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung /		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				170.840.000,00	100,00%	170.840.000,00	100,00%	126.306.402,00	100,00%	73,93%
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		72 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**86,70%**
				Predikat kinerja							**Sangat**	**Tinggi**
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100%**	**100,00 %**	**45.185.000,00**	**100% %**	**45.185.000,00**	**100% %**	**45.180.000,00**	**100,00%**	**99,99%**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				45.185.000,00	100,00%	45.185.000,00	100,00%	45.180.000,00	100,00%	99,99%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian		5 jenis		100,00%		159,00%		159,00%	
			Dokumen Perencanaan		1 Dokumen		100,00%		106,00%		106,00%	
				Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,99%**
				Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**
	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase SD terakreditasi A**	**jumlah SD terakreditasi A / jumlah SD x 100%**	**93,87 %**	**22.752.756.006,00**	**93.87%**	**22.752.756.006,00**	**92.02%**	**20.495.001.294,00**	**98,03%**	**89,51%**
			Jumlah siswa berprestasi Tk	**Jumlah medali Tingkat**	**medali**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD				483.400.500,00	100,00%	483.400.500,00	100,00%	609.293.060,00	100,00%	126,04%
			Pendalaman materi Ujian		8 kali, 7345 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Frekuensi Test Pendalaman		1 kali, 7345 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Laporan hasil Pendampingan Penyusunan		1 laporan pendampingan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Peserta workshop SPMI		48 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD				387.191.256,00	100,00%	387.191.256,00	100,00%	386.883.834,00	100,00%	99,92%
			Peserta Workshop		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pendampingan Akreditasi SD		46 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pengelolaan BOS SD		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pengadaan Sarana		8 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		3 Pengelolaan Prestasi Siswa SD				112.977.000,00	100,01%	112.977.000,00	100,01%	112.977.000,00	100,00%	100,00%
			Kejuaraan dalam OSN		2 kejuaraan		100,00%		108,00%		108,00%	
			Kejuaraan dalam OOSN SD		7 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Kejuaraan dalam FLSSN SD		6 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Kejuaraan dalam MTQ SD		15 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Kejuaraan dalam Lomba		1 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pembinaan melalui Klinik		60 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pendataan ekstrakulikuler		164 sekolah		100,00%		103,00%		103,00%	
		4 Pengelolaan BOS SD Negeri				21.769.187.250,00	100,00%	21.769.187.250,00	100,00%	19.385.847.400,00	100,00%	89,05%
			Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar		89 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**103,75%**
				Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**

	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Persentase SMP akreditasi A**	**jumlah SMP akreditasi A / jumlah SMP x 100%**	**77,97 %**	**31.914.427.872,00**	**77.97%**	**31.914.427.872,00**	**75.86%**	**26.337.232.701,00**	**97,29%**	**82,73%**
				Jumlah siswa berprestasi	**Jumlah medali tingkat**	**medali**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaraan SMP				785.855.000,00	100,02%	785.855.000,00	100,02%	785.836.000,00	100,00%	100,00%
				Pendalaman materi Ujian		4 mapel, 8010		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelaksana kegiatan		65 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan		1 dokumen penyusunan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Guru yang dilatih untuk		90 guru		100,00%		120,00%		120,00%	
				Bedah SKL UN/USBN SMP		6 mapel		100,00%		105,00%		105,00%	
				Tes Pendalaman Materi		3 kali, 8010 siswa		100,00%		182,00%		182,00%	
				Penilaian Akhir Semester /		16 sekolah, 3462		100,00%		110,00%		110,00%	
		2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP				1.263.245.940,00	99,99%	1.263.245.940,00	99,99%	1.263.031.436,00	100,00%	99,98%
				Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen		58 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendampingan Akreditasi		5 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan		2 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan sarana		16 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan BOS SMP		42 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP				141.890.100,00	100,00%	141.890.100,00	100,00%	141.584.300,00	100,00%	99,78%
				Kejuaraan dalam OOSN SMP		5 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				kejuaraan dalam Gala Siswa		1 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam OSN		5 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam Lomba		4 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan MTQ SMP		4 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Pengembangan		25 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Gelar Pelajar Jogja		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Kejuaraan Lomba		3 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1				2.177.117.038,00	100,01%	2.177.117.038,00	100,01%	1.605.684.822,00	100,00%	73,75%
				jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		788 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		26 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2				1.915.180.296,00	100,00%	1.915.180.296,00	100,00%	1.251.176.616,00	100,00%	65,33%
				jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		711 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penggadaan wastafel		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penggadaan Thermo Gun		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3				1.574.431.579,00	100,00%	1.574.431.579,00	100,00%	1.379.316.294,00	100,00%	87,61%
				jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		602 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		19 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4				1.690.391.574,00	100,00%	1.690.391.574,00	100,00%	1.261.163.469,00	100,00%	74,61%
				jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		501 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermogun		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%	

		8	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5				2.388.563.622,00	100,00%	2.388.563.622,00	100,00%	1.821.155.217,00	100,00%	76,24%
				jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		922 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		58 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Termo Gun		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6				2.084.637.421,00	100,00%	2.084.637.421,00	100,00%	1.862.043.850,00	100,00%	89,32%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		709 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		37 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermogun		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7				1.566.793.969,00	100,00%	1.566.793.969,00	100,00%	1.496.360.369,00	100,00%	95,50%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		608 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Thermal Gun		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8				3.140.365.777,00	100,00%	3.140.365.777,00	100,00%	2.450.382.360,00	100,00%	78,03%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		928 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		29 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9				1.670.672.494,00	99,99%	1.670.672.494,00	99,99%	1.389.622.701,00	100,00%	83,18%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		606 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		35 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10				1.733.048.015,00	100,01%	1.733.048.015,00	100,01%	1.565.760.668,00	100,00%	90,35%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		508 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		42 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		14	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11				1.151.339.148,00	100,00%	1.151.339.148,00	100,00%	1.033.521.442,00	100,00%	89,77%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		390 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		26 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12				1.406.031.098,00	100,00%	1.406.031.098,00	100,00%	1.392.885.625,00	100,00%	99,07%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		500 siswa		100,00%		133,20%		133,20%	
				Pengadaan Wastafel		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Termogun		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13				1.095.178.018,00	100,00%	1.095.178.018,00	100,00%	905.262.208,00	100,00%	82,66%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		394 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		16 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Termogun		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	

		17	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14				1.331.079.241,00	99,99%	1.331.079.241,00	99,99%	1.284.940.681,00	100,00%	96,53%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		388 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		27 0		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		12 0		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15				2.812.159.591,00	100,00%	2.812.159.591,00	100,00%	2.039.951.613,00	100,00%	72,54%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		989 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		55 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		33 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16				1.986.447.951,00	100,00%	1.986.447.951,00	100,00%	1.407.553.030,00	100,00%	70,86%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		857 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		39 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**85,53%**
Predikat kinerja												**Sangat**	**Tinggi**
	Aksesibilitas pendidikan meningkat	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal**		**Persentase Kelulusan UASDA Paket A**	**Jumlah peserta lulus UASDA paket A / jumlah peserta yang mengikuti UASDA paket A x 100%**	**%**	**6.294.841.898,00**	**0%**	**6.294.841.898,00**	**0%**	**6.008.466.914,00**	**0,00%**	**95,45%**
				Persentase Kelulusan UNPK Paket B	**jumlah peserta lulus UNPK paket B / jumlah peserta**	**%**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
				Persentase Kelulusan UNPK Paket C	**jumlah peserta lulus UNPK paket C / jumlah peserta**	**%**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
				Jumlah lembaga PAUD siap	**Jumlah lembaga PAUD siap**	**35,00 lembaga**	**0,00**	**35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
				Jumlah LKP terakreditasi	**Jumlah LKP terakreditasi**	**12,00 lembaga**	**0,00**	**5**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
		1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan				2.730.538.330,00	100,00%	2.730.538.330,00	100,00%	2.609.902.278,00	100,00%	95,58%
				Pelaksanaan USBN Paket A,		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelaksanaan UNPK A, B, dan		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				BOSDA SPNF SKB		16 rombel		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Insentif tutor		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bimbingan akreditasi		0 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bimbingan teknis pengelola		20 lembaga dan 7		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendampingan JBM		616 RW		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah BOP Kesetaraan		19 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Peralatan		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembangunan ruang Kelas		3 ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				3.429.020.568,00	99,98%	3.429.020.568,00	99,98%	3.264.741.636,00	100,00%	95,21%
				Pembinaan Layanan PAUD		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laporan Hasil Pendataan		1 dokumen data		100,00%		100,00%		100,00%	
				BOP PAUD		400 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Insentif Pendidik PAUD		858 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Workshop		50 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Peningkatan		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pembelajaran Media PAUD		690 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jelajah Museum		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Paket Rehap Sekolah		1 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	

		3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan				135.283.000,00	99,99%	135.283.000,00	99,99%	133.823.000,00	100,00%	98,92%
				Pendaftaran Akreditasi		40 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bimbingan Teknis Akreditasi		8 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam Apresiasi		5 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**96,57%**
Predikat kinerja												**Sangat**	**Sangat**
	Aksesibilitas pendidikan	**Program Pengembangan Pendidikan**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**jumlah guru sesuai kualifikasi / jumlah guru x**	**99,67 %**	**48.023.401.221,00**	**99.67%**	**48.023.401.221,00**	**96.21%**	**43.613.946.748,00**	**96,53%**	**90,30%**
				Jumlah sekolah inklusi	**Jumlah sekolah inklusi**	**74,00 sekolah**	**0,00**	**74**	**0,00**	**82**	**0,00**	**110,81%**	**0,00%**
		1	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				304.908.800,00	100,02%	304.908.800,00	100,02%	304.908.800,00	100,00%	100,00%
				Peserta Pengembangan		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas		1 kejuaraan		100,00%		105,00%		105,00%	
				Peserta pelatihan karya		40 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Pembinaan		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta mengusulkan angka		12 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penilaian kinerja kepala		0 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi kegiatan Dewan		12 bulan		100,00%		252,00%		252,00%	
		2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18.110.196.568,00	100,00%	18.110.196.568,00	100,00%	17.705.901.076,00	100,00%	97,77%
				Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang		2.900 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang		280 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang		3.000 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penerima TPP Kota yang		2.303 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan				967.224.080,00	100,01%	967.224.080,00	100,01%	1.212.585.960,00	100,00%	125,37%
				Pelaksanaan KBS Online		192 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rangkuman Data Pendidikan		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mengelola		443 sekolah		100,00%		185,00%		185,00%	
				Pengelolaan Informasi		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mengikuti		57 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Aplikasi yang dibangun /		3 aplikasi		100,00%		119,00%		119,00%	
				Aplikasi yang dikelola		7 aplikasi		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah				1.047.220.600,00	100,00%	1.047.220.600,00	100,00%	1.037.616.636,00	100,00%	99,08%
				Pengelolaan dana JPD		14.500 siswa		100,00%		121,00%		121,00%	
				Pengelolaan Beasiswa Dan		10.000 siswa		100,00%		107,00%		107,00%	
				Pengelolaan Retrivel		15 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Siswa yang Mendapatkan		100 Siswa		100,00%		108,00%		108,00%	
		5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA				25.350.217.200,00	100,00%	25.350.217.200,00	100,00%	21.226.027.369,00	100,00%	83,73%
				Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan		109 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mendapatkan		342 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mendapatkan		109 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Wastafel		1.144 0		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Thermo Gun		562 0		100,00%		100,00%		100,00%	

		6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi				2.243.633.973,00	99,99%	2.243.633.973,00	99,99%	2.126.906.907,00	100,00%	94,80%
				Dokumen hasil workshop		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
				Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping		112 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Siswa yang melaksanakan		650 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Sarpras SPPI		3 jenis		100,00%		140,73%		140,73%	
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**100,12%**
Predikat kinerja												**Sangat**	**Sangat**
Total anggaran dari seluruh program							**132.566.680.824,00**		**132.566.680.824,00**		**119.159.547.240,00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)												**100,00%**	**89,89%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)												**Sangat**	**Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai tata kala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: beberapa capaian indikator program tidak tercapai karena pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan seperti akreditasi tidak tercapai.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perencanaan yang lebih matang dalam penyediaan layanan pendidikan di masa pandemi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan yang lebih matang dalam penyediaan layanan pendidikan di masa pandemi

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	88.86%
2	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	2 peringkat
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	2 peringkat
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	135,90 %
		Angka partisipasi kasar SMP	133,92 %
		Angka partisipasi murni SD	130,16 %
		Angka partisipasi murni SMP	107,68 %
		Angka partisipasi sekolah	100,00 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja**	**Persentase Peningkatan Laporan**	**100,00 %**	**43.025.370.465,00**	**100%**	**43.025.370.465,00**	**100%**	**42.279.855.233,00**	**100,00%**	**98,27%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.145.000,00	100,00%	6.145.000,00	100,00%	6.145.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Forum OPD untuk Kesepakatan		1 Berita Acara		100,00%		163,00%		163,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				39.894.456.796,00	100,00%	39.894.456.796,00	100,00%	39.206.979.042,00	100,00%	98,28%
			Jumlah Siswa yang Mendapatkan Dana		10.580 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Jumlah Siswa yang Mendapatkan Dana		5.100 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA, dan		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Perjanjian Kinerja dan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Sekolah yang Mendapatkan Dana		95 Sekolah		100,00%		124,40%		124,40%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.720.000,00	100,00%	8.720.000,00	100,00%	8.720.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan,		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Dokumen Evaluasi		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	100,00%
			ADMINISTRASI		4 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	96,00%
			laporan keuangan akhir		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				117.847.376,00	100,00%	117.847.376,00	100,00%	117.675.082,00	100,00%	99,85%
			LAPORAN KEUANGAN		12 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%	
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
			LAPORAN PROGNOSIS		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				188.148.400,00	99,99%	188.148.400,00	99,99%	174.742.749,00	100,00%	92,87%
				Jasa KIR kendaraan		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan		83 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak		83 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				104.837.000,00	100,00%	104.837.000,00	100,00%	104.742.500,00	100,00%	99,91%
				Pemeliharaan AC		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Komputer		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Peralatan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Genset		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Printer		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.111.173.443,00	100,00%	1.111.173.443,00	100,00%	1.105.684.999,00	100,00%	99,51%
				Jasa Pemeliharaan rutin berkala dan rehap		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**95,00%**	**92,47%**
						Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Persentase SD terakreditasi A**	**Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi**	**90,91 %**	**162.538.401.370,00**	**90.91%**	**162.538.401.370,00**	**96.96%**	**151.600.516.474,00**	**106,65%**	**93,16%**
				Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional	**Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional**	**3,00 medali**	**0,00**	**3**	**0,00**	**7**	**0,00**	**233,33%**	**0,00%**
				Persentase SMP Akreditasi A	**Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi**	**75,00 %**	**0,00**	**75**	**0,00**	**75.86**	**0,00**	**101,15%**	**0,00%**
				Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	**Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional**	**3,00 medali**	**0,00**	**3**	**0,00**	**5**	**0,00**	**166,67%**	**0,00%**
				Persentase Kelulusan warga belajar	**jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah**	**90,50 %**	**0,00**	**90.5**	**0,00**	**92.23**	**0,00**	**101,91%**	**0,00%**
				Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	**Jumlah lembaga PAUD siap**	**60,00 lembaga**	**0,00**	**60**	**0,00**	**56**	**0,00**	**93,33%**	**0,00%**
				Jumlah LKP terakreditasi	**Jumlah LKP terakreditasi**	**5,00 lembaga**	**0,00**	**13**	**0,00**	**13**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
				Jumlah sekolah inklusi	**Jumlah sekolah**	**84,00 sekolah**	**0,00**	**84**	**0,00**	**92**	**0,00**	**109,52%**	**0,00%**
				Persentase guru sesuai kualifikasi	**Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah**	**99,70 %**	**0,00**	**99.7**	**0,00**	**94.86**	**0,00**	**95,15%**	**0,00%**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas				1.867.619.877,00	100,00%	1.867.619.877,00	100,00%	1.843.933.611,00	100,00%	98,73%
				Rehab Sekolah		8 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Pengadaan Mebel Sekolah				1.357.500.000,00	100,00%	1.357.500.000,00	100,00%	1.357.496.400,00	100,00%	100,00%
				Pengadaan meja kursi		1.000 set		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				704.343.500,00	99,99%	704.343.500,00	99,99%	652.331.819,00	100,00%	92,62%
				Assesment Kompetensi		167 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bimtek Penyusunan Soal		48 guru		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelaksanaan Ujian		167 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengembangan Media atau alat peraga		54 modul		100,00%		100,00%		100,00%	
				Test Pendalaman Materi		7.345 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				280.370.000,00	100,00%	280.370.000,00	100,00%	205.370.000,00	100,00%	73,25%
				Evaluasi dan laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan laporan pelaksanaan Sistem		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa				364.401.000,00	99,99%	364.401.000,00	99,99%	341.851.000,00	100,00%	93,81%
				Kompetisi Sains Nasional		2 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Festival Lomba Seni		5 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Musabaqoh Tilawatil		14 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	

		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				19.468.357.382,00	100,00%	19.468.357.382,00	100,00%	18.978.387.454,00	100,00%	97,48%
				Kegiatan Pengembangan		440 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Pengusulan		115 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Induksi Guru		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Pembinaan		115 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Karya Ilmiah		53 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Lesson Study		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga		765 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi Dan Kajian Kebijakan Pendidikan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Profil Guru Teladan		1 video		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				53.510.000,00	100,00%	53.510.000,00	100,00%	53.116.200,00	100,00%	99,26%
				Pendampingan Akreditasi		25 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Workshop		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan		5 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				20.994.566.746,00	100,00%	20.994.566.746,00	100,00%	20.343.081.584,00	100,00%	96,90%
				Pengelolaan BOS SD		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		9	Pengadaan Mebel Sekolah				522.807.840,00	100,00%	522.807.840,00	100,00%	521.807.540,00	100,00%	99,81%
				Pengadaan Mebelair		340 set		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				1.042.800.000,00	100,00%	1.042.800.000,00	100,00%	973.136.000,00	100,00%	93,32%
				Pengadaan Mesin Risso		9 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1.703.382.400,00	100,00%	1.703.382.400,00	100,00%	1.635.473.295,00	100,00%	96,01%
				Pengadaan Pelaratan Lab		4 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Belanja Modal		4 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Media		4 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				424.198.400,00	100,01%	424.198.400,00	100,01%	277.196.400,00	100,00%	65,35%
				Pelaksanaan Ujian		65 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Test Pendalaman Materi		8.000 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penilaian Akhir Semester		16 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Aplikasi Pembelajaran		1 aplikasi		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				425.045.000,00	100,01%	425.045.000,00	82,36%	349.606.000,00	82,35%	82,25%
				Evaluasi dan Laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Assesment Kompetensi Minimum (Latihan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kajian Transportasi Siswa		1 laporan		100,00%		0,00%		0,00%	
		14	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa				587.185.000,00	100,00%	587.185.000,00	66,10%	385.685.000,00	66,10%	65,68%
				Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa		4 Medali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kompetisi Sains nasional		3 Medali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kompetisi Penelitian		3 Medali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan MTQ SMP		4 Medali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jaminan Asuransi		13.266 siswa		100,00%		0,00%		0,00%	

		15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	penerima tunjangan profesi guru dan		1.660 orang	25.521.334.996,00	100,00%	25.521.334.996,00	100,00%	24.931.388.171,00	100,00%	97,69%
				penerima insentif GTT/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai		3.273 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai		1.746 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Honor		301 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		3.999 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				90.408.844,00	99,99%	90.408.844,00	99,99%	85.004.316,00	100,00%	94,02%
				Pengelolaan BOS SMP		57 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Workshop Manajemen		57 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Akreditasi Sekolah		6 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Konsumtan Perencana Pemetaan Prasarana		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD				666.557.175,00	100,00%	666.557.175,00	100,00%	609.532.175,00	100,00%	91,44%
				Jumlah paket rehab		2 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				2.621.443.850,00	100,00%	2.621.443.850,00	100,00%	2.428.688.850,00	100,00%	92,65%
				Jumlah Peserta Pelatihan		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan		73 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta Uji		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Layanan		4 layanan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Pendidik		750 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Modul PAUD		692 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				3.914.220.229,00	99,99%	3.914.220.229,00	99,99%	3.901.294.964,00	100,00%	99,67%
				Fasilitasi Akreditasi Lembaga Dikmas (LKP,		50 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana BOSDA		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana BOSDA		218 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Pengelolaan Dana BOP PAUD				9.764.956.656,00	100,00%	9.764.956.656,00	100,00%	7.003.817.618,00	100,00%	71,72%
				Pengelolaan Dana BOP		450 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		21	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				703.864.000,00	99,99%	703.864.000,00	99,99%	684.283.400,00	100,00%	97,22%
				Pelaksanaan Ujian		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendampingan Jam		616 RW		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Kampung		21 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Taman		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peningkatan Kompetensi		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelaksanaan ASPD Kejar		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		22	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan				302.400.000,00	100,00%	302.400.000,00	100,00%	302.400.000,00	100,00%	100,00%
				Pembinaan Tutor		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	

		23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Aplikasi yang dibangun /		9 aplikasi	1.392.342.830,00	100,00%	1.392.342.830,00	100,00%	1.391.818.210,00	100,00%	99,96%
				Pelaksanaan KBS Online		192 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Website		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Publikasi Data Pendidikan (Buku		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan		57 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	Pengelolaan Dana BOP Sekolah				2.475.500.000,00	100,00%	2.475.500.000,00	100,00%	2.179.430.930,00	100,00%	88,04%
				Pengelolaan BOP		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				115.000.000,00	100,00%	115.000.000,00	100,00%	114.963.625,00	100,00%	99,97%
				Pengadaan Alat Tes		2 set		100,00%		100,00%		100,00%	
		26	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				195.085.000,00	100,00%	195.085.000,00	100,00%	186.336.000,00	100,00%	95,52%
				Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
				Siswa yang		300 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah Penyelenggara		75 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas				2.723.286.900,00	100,00%	2.723.286.900,00	100,00%	2.618.620.720,00	100,00%	96,16%
				Guru yang mendapatkan honor dan insentif Guru		113 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		28	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah				29.336.473.688,00	100,00%	29.336.473.688,00	100,00%	26.964.655.370,00	100,00%	91,92%
				Pengelolaan JPD		18.270 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laporan Pengelolaan		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laporan Pengelolaan		14.100 Siswa		100,00%		131,00%		131,00%	
		29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16				2.214.151.337,00	100,00%	2.214.151.337,00	100,00%	2.036.228.773,00	100,00%	91,96%
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		712 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10				1.547.668.806,00	100,00%	1.547.668.806,00	100,00%	1.539.095.629,00	100,00%	99,45%
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		533 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		31	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11				1.131.696.486,00	100,00%	1.131.696.486,00	100,00%	1.092.584.736,00	100,00%	96,54%
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		394 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12				1.315.947.052,00	100,00%	1.315.947.052,00	100,00%	1.315.702.758,00	100,00%	99,98%
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		489 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13				1.250.801.041,00	100,00%	1.250.801.041,00	100,00%	1.083.005.591,00	100,00%	86,58%
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		399 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14				1.085.380.826,00	100,00%	1.085.380.826,00	100,00%	1.059.417.688,00	100,00%	97,61%
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		395 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15				3.106.370.991,00	100,00%	3.106.370.991,00	100,00%	2.572.530.033,00	100,00%	82,81%
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		995 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4				1.564.951.967,00	100,00%	1.564.951.967,00	100,00%	1.366.934.587,00	100,00%	87,35%
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		501 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5				2.774.381.218,00	100,00%	2.774.381.218,00	100,00%	2.352.248.899,00	100,00%	84,78%
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan		912 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	

		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		700 Siswa	1.993.447.243,00	100,00%	1.993.447.243,00	100,00%	1.904.808.658,00	100,00%	95,55%
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		606 siswa	1.632.551.600,00	100,00%	1.632.551.600,00	100,00%	1.627.929.301,00	100,00%	99,72%
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		952 siswa	2.664.493.984,00	100,00%	2.664.493.984,00	100,00%	2.458.279.050,00	100,00%	92,26%
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		604 Siswa	1.812.707.359,00	100,00%	1.812.707.359,00	100,00%	1.690.245.559,00	100,00%	93,24%
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		786 Bulan	2.552.215.083,00	100,00%	2.552.215.083,00	100,00%	2.493.609.252,00	100,00%	97,70%
		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		669 Buah	2.111.152.411,00	100,00%	2.111.152.411,00	100,00%	1.614.660.535,00	100,00%	76,48%
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3	Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		603 siswa	1.685.039.653,00	100,00%	1.685.039.653,00	100,00%	1.630.149.973,00	100,00%	96,74%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan		8 Sekolah	2.277.513.000,00	100,00%	2.277.513.000,00	100,00%	2.253.808.800,00	100,00%	98,96%
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan		1 Lembaga	198.970.000,00	100,00%	198.970.000,00	100,00%	188.570.000,00	100,00%	94,77%
					Rata-rata capaian kinerja							**98,88%**	**92,24%**
					Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif**	**(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang**	**92,00 %**	**2.299.451.500,00**	**92%**	**2.299.451.500,00**	**92,31 %**	**2.061.340.250,00**	**100,00%**	**89,64%**
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Seleksi Pemuda Pelopor		100 Pemuda	104.850.000,00	100,00%	104.850.000,00	100,00%	102.675.000,00	100,00%	97,93%
		2	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas		33 Organisasi Kepemudaan	269.030.000,00	100,00%	269.030.000,00	100,00%	268.730.000,00	100,00%	99,89%
		3	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas		33 Organisasi Kepemudaan	1.472.751.500,00	100,00%	1.472.751.500,00	100,00%	1.292.515.250,00	100,00%	87,76%
		4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana		33 Organisasi Kepemudaan	421.020.000,00	100,00%	421.020.000,00	100,00%	366.620.000,00	100,00%	87,08%

		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		5	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi				31.800.000,00	100,00%	31.800.000,00	100,00%	30.800.000,00	100,00%	96,86%
				Dokumen data potensi		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,90%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING**		**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang**	**(Jumlah organisasi olahraga masyarakat**	**97,00 %**	**9.254.768.000,00**	**97%**	**9.254.768.000,00**	**98.57%**	**9.026.574.864,00**	**101,62%**	**97,53%**
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				93.262.000,00	100,01%	93.262.000,00	100,01%	74.548.000,00	100,00%	79,93%
				Kejuaraan Dalam Kompetisi Olahraga		2 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan Dalam Kompetisi Olahraga		2 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan Dalam		1 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
		2	Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan				453.725.000,00	100,00%	453.725.000,00	100,00%	440.284.400,00	100,00%	97,04%
				Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan		102 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
		3	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				47.171.000,00	100,00%	47.171.000,00	100,00%	47.171.000,00	100,00%	100,00%
				Pelatihan Pelaku		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendataan Kelompok		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				8.650.000.000,00	100,01%	8.650.000.000,00	100,01%	8.453.969.464,00	100,00%	97,73%
				Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota		48 pengkot		100,00%		100,00%		100,00%	
				pembinaan Olahraga Rekreasi Melalui FORMI		422.732 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
		5	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				10.610.000,00	100,00%	10.610.000,00	100,00%	10.602.000,00	100,00%	99,92%
				Penyelenggaraan Pengembangan dan		12 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**94,93%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**(Jumlah kegiatan yang relevan /jumlah kegiatan yang**	**66,30 %**	**340.863.600,00**	**66.30%**	**340.863.600,00**	**78.05%**	**340.863.600,00**	**117,72%**	**98,63%**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
		1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				340.863.600,00	100,00%	340.863.600,00	100,00%	340.863.600,00	100,00%	100,00%
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan		1 Organisasi Kepemudaan		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
						Total anggaran dari seluruh program		**217.458.854.935,00**		**217.458.854.935,00**		**205.309.150.421,00**		
						Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						**98,03%**	**94,41%**
						Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						**Sangat**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: adanya komitmen dari PPTK untuk dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan sesuai tatakal
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kondisi Pandemi dan aturan PPKM sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal; Penyesuaian beberapa regulasi dari pusat,
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Pencermatan terhadap indikator program dan sasaran perangkat daerah yang akan direncanakan untuk dilakukan review
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan capaian program dan kegiatan serta realisasi fisik dan keuangan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	142,76 %
		Angka partisipasi kasar SMP	141.50%
		Angka partisipasi murni SD	130,21 %
		Angka partisipasi murni SMP	107,89 %
		Angka partisipasi sekolah	100,00 %
2	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	99,00 %
3	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	1 peringkat
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	1 peringkat

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**4.716.712.420,00**	**A nilai**	**4.716.712.420,00**	**A nilai**	**4.063.666.745,00**	**100%**	**86,15%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				86.675.000,00	100,00%	86.675.000,00	100,00%	81.510.650,00	100,00%	94,04%
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Forum OPD untuk kesepakatan		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%	
			Penyusunan Naskah Akademik dan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				34.275.000,00	100,00%	34.275.000,00	100,00%	34.275.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan; dan Hasil		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan,		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.945.000,00	100,00%	15.945.000,00	100,00%	15.945.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Evaluasi		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.880.000,00	100,00%	4.880.000,00	100,00%	4.878.100,00	100,00%	99,96%
				Administrasi		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Keuangan Akhir		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes				161.265.600,00	100,00%	161.265.600,00	100,00%	161.207.600,00	100,00%	99,96%
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi				1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Prognosis		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				66.797.120,00	100,00%	66.797.120,00	100,00%	66.797.120,00	100,00%	100,00%
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				261.481.750,00	99,98%	261.481.750,00	99,98%	260.570.250,00	100,00%	99,65%
				Alat Tulis Kantor		63 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bahan Komputer		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Cartride Printer		50 Dos		100,00%		100,00%		100,00%	
				Flash Disk		10 Buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kabel HDMI/ USB		5 Buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Mouse		25 Buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peralatan Rumah		50 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Reffil Tinta		100 Dos		100,00%		100,00%		100,00%	
				SSD		5 Buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Toner Printer		120 Tube		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				56.555.600,00	100,00%	56.555.600,00	100,00%	54.468.800,00	100,00%	96,31%
				Barang Cetakan		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penggandaan Surat-		110.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				73.386.500,00	100,00%	73.386.500,00	100,00%	73.366.500,00	100,00%	99,97%
				Surat Kabar selama 12		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Buku dan atau		250 buku		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				703.700.000,00	100,00%	703.700.000,00	100,00%	657.333.287,00	100,00%	93,41%
				Makan Minum Rapat		500 os		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rapat Koordinasi dan		20 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		60 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rapat Koordinasi dan		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				795.320.800,00	100,00%	795.320.800,00	69,30%	397.869.950,00	69,30%	50,03%
				Komputer		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Monitor		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Papan Nama sekolah		124 Unit		100,00%		35,00%		35,00%	
				Printer		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				SSD		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Tangga Lipat		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				TV		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Webcam		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kompresor		1		100,00%		100,00%		100,00%	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				71.767.240,00	100,00%	71.767.240,00	100,00%	70.416.188,00	100,00%	98,12%
				Materai		1.560 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengiriman Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
				Surat Keluar		600 Surat		100,00%		100,00%		100,00%	
				Surat Masuk		500 Surat		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air				7.200.000,00	100,00%	7.200.000,00	100,00%	6.794.588,00	100,00%	94,37%
				Pembayaran Rekening		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				408.665.609,00	99,99%	408.665.609,00	99,99%	402.665.608,00	100,00%	98,53%
				Jasa Cleaning Servis		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Kebersihan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sewa/ Pemeliharaan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				376.244.212,00	100,00%	376.244.212,00	100,00%	334.690.150,00	100,00%	88,96%
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala		83 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan		83 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				298.500.000,00	100,01%	298.500.000,00	95,43%	202.034.235,00	95,42%	67,68%
				AC Split		20 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%	
				Komputer		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laptop		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Mebelair		3 Jenis		100,00%		29,00%		29,00%	
				Printer		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sound System		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.290.372.989,00	100,00%	1.290.372.989,00	100,00%	1.235.163.719,00	100,00%	95,72%
				Jasa Keamanan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Gedung/		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**98,14%**	**93,51%**
					Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Aksesibilitas pendidikan meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**60**	**227.475.445.871,00**	**60**	**227.475.445.871,00**	**78**	**214.960.752.026,00**	**130%**	**94,53%**
			Persentase Kelulusan warga belajar	**jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di**	**96,15 %**	**0,00**	**96.15**	**0,00**	**100**	**0,00**	**104,00%**	**0,00%**
			Jumlah LKP terakreditasi	**Jumlah LKP terakreditasi**	**14 lbg**	**0,00**	**14**	**0,00**	**13**	**0,00**	**92,86%**	**0,00%**
			Jumlah sekolah inklusi	**Jumlah sekolah inklusi**	**86,00 %**	**0,00**	**95**	**0,00**	**100**	**0,00**	**105,26%**	**0,00%**
			Persentase guru sesuai kualifikasi	**Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah guru dikali**	**99,75 %**	**0,00**	**95-99.75**	**0,00**	**93.68**	**0,00**	**98,61%**	**0,00%**
			Persentase SD terakreditasi A	**Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah**	**92,12 %**	**0,00**	**92.12**	**0,00**	**92.12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional	**Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh**	**8 medali**	**0,00**	**8-Mar**	**0,00**	**3**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Persentase SMP akreditasi A	**Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah**	**77,59 %**	**0,00**	**77.59**	**0,00**	**77.19**	**0,00**	**99,48%**	**0,00%**
			Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	**Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh**	**6 medali**	**0,00**	**6**	**0,00**	**5**	**0,00**	**83,33%**	**0,00%**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
		1 Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan				978.601.700,00	100,00%	978.601.700,00	100,00%	954.242.086,00	100,00%	97,51%
			Rehab Sekolah		4 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 Pengadaan Mebel Sekolah				583.400.000,00	100,00%	583.400.000,00	100,00%	583.273.800,00	100,00%	99,98%
			Pengadaan meja kursi		420 set		100,00%		100,00%		100,00%	
		3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				2.463.834.001,00	100,00%	2.463.834.001,00	100,00%	2.237.570.663,00	100,00%	90,82%
			Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan		61 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource				140.485.000,00	100,00%	140.485.000,00	100,00%	138.002.626,00	100,00%	98,23%
			Pengadaan Alat Kesenian Sekolah		16 set		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pengadaan Alat Tes		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		5 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource				301.598.750,00	99,99%	301.598.750,00	99,99%	300.598.750,00	100,00%	99,67%
			Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
			Siswa Yang Melakukan		400 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Sekolah Penyelenggara		95 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		6 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				923.172.000,00	100,01%	923.172.000,00	100,01%	922.146.140,00	100,00%	99,89%
			Assesmen Nasional		169 sekolah		100,00%		341,00%		341,00%	
			Bimtek Penyusunan		150 guru		100,00%		207,00%		207,00%	
			Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (		168 sekolah		100,00%		253,00%		253,00%	
			Test Pendalaman		7.345 siswa		100,00%		118,00%		118,00%	
		7 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				231.655.000,00	100,01%	231.655.000,00	100,01%	230.000.503,00	100,00%	99,29%
			Evaluasi dan Laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Evaluasi dan Laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		8 Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa				589.752.000,00	100,00%	589.752.000,00	100,00%	587.347.000,00	100,00%	99,59%
			Kompetisi Sains		2 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Festival Lomba Seni		6 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Musabaqah Tilawatil		15 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
			Lomba Dokter Kecil		3 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pembinaan Klinik Sains		60 Siswa		100,00%		98,00%		98,00%	
			Program Pengembangan Minat		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
			Pelayanan Vaksin Siswa		0 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	

		9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				18.797.391.960,00	99,99%	18.797.391.960,00	99,99%	18.266.090.686,00	100,00%	97,17%
				Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok Kerja guru		440 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta mengusulkan		115 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penilaian kinerja kepala		30 Orang		100,00%		97,00%		97,00%	
				Peserta Pembinaan		225 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta pelatihan karya		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Kegiatan		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga		735 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan				3.350.700.000,00	100,00%	3.350.700.000,00	100,00%	3.296.078.581,00	100,00%	98,37%
				Guru yang mendapatkan honor		156 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengembangan kompetensi Guru		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan Best Practise		1 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				38.351.400,00	100,00%	38.351.400,00	100,00%	41.209.400,00	100,00%	107,45%
				Pendampingan		25 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peserta Workshop		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi pendirian, penataan dan		5 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				39.914.514.196,00	100,00%	39.914.514.196,00	100,00%	36.599.287.071,00	100,00%	91,69%
				Pengelolaan BOS SD		164 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				40.802.875.280,00	100,01%	40.802.875.280,00	100,01%	39.311.720.982,00	100,00%	96,35%
				Jumlah Siswa Penerima BOSDA Khusus Sekolah		1.514 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana		11.270 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana		5.726 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang Mendapatkan dana		22.789 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		14	Penambahan Ruang Kelas Baru				56.400.000,00	100,00%	56.400.000,00	100,00%	55.981.250,00	100,00%	99,26%
				Pembangunan Ruang		1 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				450.837.759,00	100,00%	450.837.759,00	100,00%	450.652.726,00	100,00%	99,96%
				Pembangunan Ruang		1 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Pembangunan Laboratorium				522.700.911,00	100,00%	522.700.911,00	100,00%	522.463.830,00	100,00%	99,95%
				Pembangunan Ruang Laborarorium IPA (Ilmu		1 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				324.926.666,00	100,00%	324.926.666,00	100,00%	319.161.715,00	100,00%	98,23%
				Rehab Sekolah		2 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	

		18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah				27.234.022.240,00	100,00%	27.234.022.240,00	100,00%	26.558.937.140,00	100,00%	97,52%
				Pengelolaan Beasiswa		20.645 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana		16.000 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan JPD		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				362.192.000,00	100,01%	362.192.000,00	100,01%	334.694.630,00	100,00%	92,41%
				Pengadaan Alat Praktik		4 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Alat Praktik		2 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengadaan CCTV		105 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				261.006.600,00	100,00%	261.006.600,00	100,00%	259.996.600,00	100,00%	99,61%
				Pelaksanaan Assesmen		65 sekolah		100,00%		102,00%		102,00%	
				Peniaian Akhir		16 sekolahan		100,00%		205,00%		205,00%	
		21	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				325.483.500,00	100,00%	325.483.500,00	100,00%	321.775.600,00	100,00%	98,86%
				Assesmen Nasional		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kajian Pendidikan		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		22	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				1.064.133.200,00	100,00%	1.064.133.200,00	100,00%	836.437.600,00	100,00%	78,60%
				Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni		5 Kejuaraan		100,00%		302,00%		302,00%	
				Kejuaraan dalam		3 Kejuaraan		100,00%		107,00%		107,00%	
				Kejuaraan dalam Olimpiade Penelitian		3 Kejuaraan		100,00%		206,00%		206,00%	
				Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi		4 Kejuaraan		100,00%		220,00%		220,00%	
				Kejuaraan MTQ SMP		4 Kejuaraan		100,00%		250,00%		250,00%	
		23	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				24.181.878.956,00	99,99%	24.181.878.956,00	99,99%	23.641.979.395,00	100,00%	97,77%
				Penerima Tunjangan Profesi Guru dan		1.660 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penerima Insentif GTT/ GuruTetap Yayasan		2.690 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Tambahan		220 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai		1.746 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Honor		235 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah PGRI		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				12.787.951.099,00	100,00%	12.787.951.099,00	100,00%	11.878.589.943,00	100,00%	92,89%
				Pengelolaan dan Pengembangan		58 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana BOS		58 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	

		25	Pengelolaan Dana BOS				2.164.587.791,00	100,00%	2.164.587.791,00	100,00%	2.092.060.231,00	100,00%	96,65%
			Sekolah Menengah Pertama	BOSDA Karakter		788 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Upt Smp Negeri 1	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan		788 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		26	Pengelolaan Dana BOS				1.793.624.073,00	100,00%	1.793.624.073,00	100,00%	1.224.810.756,00	100,00%	68,29%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 2	terlayani kegiatan		671 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		27	Pengelolaan Dana BOS				1.622.419.680,00	100,00%	1.622.419.680,00	100,00%	1.564.577.878,00	100,00%	96,43%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 3	terlayani Kegiatan		597 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		28	Pengelolaan Dana BOS				1.387.980.989,00	100,00%	1.387.980.989,00	100,00%	1.262.546.021,00	100,00%	90,96%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 4	terlayani Kegiatan		492 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		29	Pengelolaan Dana BOS				2.494.996.573,00	100,00%	2.494.996.573,00	100,00%	2.092.723.805,00	100,00%	83,88%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang									
			Upt Smp Negeri 5	terlayani Kegiatan		913 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		30	Pengelolaan Dana BOS				1.859.896.338,00	100,00%	1.859.896.338,00	100,00%	1.796.112.115,00	100,00%	96,57%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 6	terlayani Kegiatan		700 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		31	Pengelolaan Dana BOS				1.404.360.000,00	100,00%	1.404.360.000,00	100,00%	1.400.394.627,00	100,00%	99,72%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 7	terlayani Kegiatan		606 siswa		100,00%		107,00%		107,00%	
		32	Pengelolaan Dana BOS				2.754.624.010,00	100,00%	2.754.624.010,00	100,00%	2.624.239.246,00	100,00%	95,27%
			Sekolah Menengah Pertama	BOSDA Karakter		952 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Upt Smp Negeri 8	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan		952 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		33	Pengelolaan Dana BOS				1.784.191.459,00	100,00%	1.784.191.459,00	100,00%	1.645.727.905,00	100,00%	92,24%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 9	terlayani kegiatan		605 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		34	Pengelolaan Dana BOS				1.424.104.874,00	100,00%	1.424.104.874,00	100,00%	1.263.881.309,00	100,00%	88,75%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 10	terlayani Kegiatan		533 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		35	Pengelolaan Dana BOS				968.181.809,00	100,00%	968.181.809,00	100,00%	910.572.455,00	100,00%	94,05%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 11	terlayani Kegiatan		393 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		36	Pengelolaan Dana BOS				1.304.385.424,00	100,00%	1.304.385.424,00	100,00%	1.290.620.238,00	100,00%	98,94%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 12	terlayani Kegiatan		483 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		37	Pengelolaan Dana BOS				1.227.722.173,00	100,00%	1.227.722.173,00	100,00%	1.092.971.774,00	100,00%	89,02%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Penerima		134 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Upt Smp Negeri 13	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan		399 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		38	Pengelolaan Dana BOS				1.068.786.937,00	100,00%	1.068.786.937,00	100,00%	1.052.155.631,00	100,00%	98,44%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 14	terlayani Kegiatan		395 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		39	Pengelolaan Dana BOS				2.827.800.785,00	100,00%	2.827.800.785,00	100,00%	2.393.086.224,00	100,00%	84,63%
			Sekolah Menengah Pertama	BOSDA Karakter		989 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
			Upt Smp Negeri 15	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan		989 Siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		40	Pengelolaan Dana BOS				1.960.969.164,00	100,00%	1.960.969.164,00	100,00%	1.874.136.949,00	100,00%	95,57%
			Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang									
			Upt Smp Negeri 16	terlayani Kegiatan		711 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				2.454.816.000,00	100,01%	2.454.816.000,00	100,01%	2.253.060.000,00	100,00%	91,78%
				Gebyar PAUD		1.000 anak		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jelajah Museum		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta Pelatihan		280 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jumlah Peserta Uji		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Layanan		4 layanan		100,00%		95,50%		95,50%	
				Pengelolaan Pendidik		676 orang		100,00%		190,00%		190,00%	
		42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				5.338.672.120,00	100,00%	5.338.672.120,00	100,00%	5.270.086.066,00	100,00%	98,72%
				Bimtek Pengelola LKP		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bimtek Pengelola PKBM		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Akreditasi Lembaga Dikmas (LKP,		50 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Dana		219 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		43	Pengelolaan Dana BOP PAUD				8.707.871.840,00	100,00%	8.707.871.840,00	100,00%	7.125.013.011,00	100,00%	81,82%
				Pengelolaan Dana BOP		450 Lembaga		100,00%		226,00%		226,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		44	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				918.777.730,00	99,98%	918.777.730,00	99,98%	914.552.725,00	100,00%	99,54%
				Pelaksanaan Ujian		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Taman		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Kampung		31 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendampingan Jam		617 RW		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peningkatan		25 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Saka		1 Saka		100,00%		100,00%		100,00%	
		45	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan				424.400.000,00	100,00%	424.400.000,00	100,00%	423.762.000,00	100,00%	99,85%
				Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Tutor		120 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		46	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.297.459.440,00	100,00%	1.297.459.440,00	100,00%	1.283.556.590,00	100,00%	98,93%
				Jumlah Aplikasi yang		7 Aplikasi		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelaksanaan KBS Online		192 Kali		100,00%		82,00%		82,00%	
				Pengelolaan Website		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Publikasi Data Pendidikan (Buku		4 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan		51 Sekolah		100,00%		88,00%		88,00%	
		47	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				2.239.900.000,00	100,00%	2.239.900.000,00	100,00%	2.104.830.429,00	100,00%	93,97%
				Pengelolaan BOP Kesetaraan		16 Lembaga		100,00%		189,50%		189,50%	

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		48	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				137.539.663,00	100,00%	137.539.663,00	100,00%	137.539.663,00	100,00%	100,00%
				Rehab Perpustakaan		1 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		49	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				231.300.330,00	100,00%	231.300.330,00	100,00%	231.300.330,00	100,00%	100,00%
				Rehab Laboratorium		1 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		50	Pengadaan Mebel Sekolah				152.112.451,00	100,00%	152.112.451,00	100,00%	152.112.451,00	100,00%	100,00%
				Pengadaan Mebel		3 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		51	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				836.100.000,00	100,00%	836.100.000,00	100,00%	836.082.880,00	100,00%	100,00%
				Pengadaan LCD		142 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,39%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif**	**(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi**	**100%**	**3.403.704.110,00**	**100%**	**3.403.704.110,00**	**100%**	**3.296.955.276,00**	**100%**	**96,86%**
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				103.275.000,00	100,00%	103.275.000,00	100,00%	99.350.000,00	100,00%	96,20%
				Seleksi Pemuda Pelopor		5 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya				323.550.000,00	100,00%	323.550.000,00	100,00%	292.100.000,00	100,00%	90,28%
				Jambore Pemuda		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Expo Karya Pemuda		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader				1.978.906.490,00	99,99%	1.978.906.490,00	99,99%	1.934.630.180,00	100,00%	97,76%
				Pembinaan		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Lomba Baris Berbaris		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Seleksi Pembinaan dan		46 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				648.605.000,00	100,00%	648.605.000,00	100,00%	621.511.000,00	100,00%	95,82%
				Gebyar Sumpah		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Gelar Pelajar		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Lomba Kreativitas		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Kreativitas		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemuda Jogja Mencari		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengendalian Kenakalan Remaja		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		5	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				349.367.620,00	100,01%	349.367.620,00	100,01%	349.364.096,00	100,00%	100,00%
				Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi		35 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Pemuda melalui Insan Muda		1 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Pemuda		1 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Data		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,01%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif**	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif**	**100%**	**14.620.873.991,00**	**100%**	**14.620.873.991,00**	**100%**	**14.024.456.967,00**	**100%**	**95,92%**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana				41.977.150,00	100,00%	41.977.150,00	100,00%	41.941.800,00	100,00%	99,92%
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga		7 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				184.750.000,00	100,01%	184.750.000,00	100,01%	79.010.000,00	100,00%	42,77%
				Kejuaraan dalam Gala		1 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam		11 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kejuaraan dalam		5 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1.344.817.000,00	100,00%	1.344.817.000,00	100,00%	1.336.019.000,00	100,00%	99,35%
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan		29 cabang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
		4	Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan				895.242.240,00	100,00%	895.242.240,00	100,00%	832.233.040,00	100,00%	92,96%
				Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas		134 siswa		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan				60.822.240,00	100,00%	60.822.240,00	100,00%	60.822.240,00	100,00%	100,00%
				Pengelolaan Data		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
		6	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				65.440.000,00	100,00%	65.440.000,00	100,00%	65.240.000,00	100,00%	99,69%
				Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Pelaku		60 Pelatih		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi		46 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				8.590.493.550,00	100,00%	8.590.493.550,00	100,00%	8.313.358.828,00	100,00%	96,77%
				Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas		65 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota		42 Pengkot		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
		8	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				737.400.000,00	100,00%	737.400.000,00	100,00%	627.275.000,00	100,00%	85,07%
				Kelompok Senam yang		14 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga				2.589.236.811,00	100,00%	2.589.236.811,00	100,00%	2.562.126.059,00	100,00%	98,95%
				Jumlah sarana olahraga		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kajian Naskah		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan				101.420.000,00	100,00%	101.420.000,00	100,00%	97.171.000,00	100,00%	95,81%
				Pengembangan dan		22 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam				9.275.000,00	100,00%	9.275.000,00	100,00%	9.260.000,00	100,00%	99,84%
				Pemanfaatan Olahraga		2 Kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**91,92%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**(Jumlah kegiatan yang relevan /jumlah kegiatan yang diusulkan x 100%)**	**95%**	**298.000.000,00**	**95%**	**298.000.000,00**	**90.32%**	**298.000.000,00**	**95%**	**100,00%**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
		1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				298.000.000,00	100,00%	298.000.000,00	100,00%	298.000.000,00	100,00%	100,00%
				Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang		485 Gudep		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**
						Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
						Total anggaran dari seluruh program	**250.514.736.392,00**		**250.514.736.392,0**		**236.643.831.014,0**		
						Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						**99,59%**	**94,46%**
						Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: adanya komitmen dari Kepala Dinas dan semua struktural dan sub koordinator sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: masih banyak pelaksanaan kegiatan yang realisasinya mengalami penundaan, dikarenakan ada beberapa faktor dari luar, seperti kegiatan lomba lomba,karena kebijakan dari pusat pelaksanaannya mundur, dan masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring. pengelolaan data di dapodik dengan data dari pusat terkadang masih mengalami ke tidaksinkronan, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan data
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: ditahun berikutnya harapannya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala dan ploting, dan tidak jauh dari yang sudah di rencanakan sesuai tatakala

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	53.94 persen
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	40,27 nilai
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	63,12 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	54,80 nilai
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.66%
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	88.95%
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Huruf

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2023	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**111,98 %**	**189.746.539.431,00**	**111.98%**	**189.746.539.431,00**	**100%**	**185.205.850.113,00**	**89.30%**	**111,95%**
			Angka Partisipasi Kasar SD	**(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**98,79 %**	**0,00**	**98.79**	**0,00**	**105.22**	**0,00**	**106,51%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Murni SD	**APM SD = (Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**98,37 %**	**0,00**	**98.37**	**0,00**	**105.94**	**0,00**	**107,70%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Kasar SMP	**APK SMP = (Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**99,00 %**	**0,00**	**97.11**	**0,00**	**112.39**	**0,00**	**115,73%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Murni SMP	**APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**90,24 %**	**0,00**	**90.24**	**0,00**	**100**	**0,00**	**110,82%**	**0,00%**
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**105,96 %**	**0,00**	**105.96**	**0,00**	**100**	**0,00**	**94,38%**	**0,00%**
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal	**Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%**	**90,90 %**	**0,00**	**90.9**	**0,00**	**62.53**	**0,00**	**68,79%**	**0,00%**
			Persentase Kelulusan warga belajar	**Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%**	**93,20 %**	**0,00**	**93.2**	**0,00**	**100**	**0,00**	**107,30%**	**0,00%**
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	**(jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah dasar) x 100%**	**98,78 %**	**0,00**	**98.78**	**0,00**	**98.79**	**0,00**	**100,01%**	**0,00%**
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**(jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%**	**98,30 %**	**0,00**	**98.3**	**0,00**	**98.28**	**0,00**	**99,98%**	**0,00%**

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		1	Penambahan Ruang Kelas Baru				103.084.004,00	100,00%	103.084.004,00	100,00%	103.084.004,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang		1 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				111.066.000,00	100,00%	111.066.000,00	100,00%	111.066.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah perpustakaan sekolah		1 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				405.911.743,00	100,00%	405.911.743,00	100,00%	405.911.743,00	100,00%	100,00%
				Jumlah SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang telah		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				1.058.050.321,00	100,00%	1.058.050.321,00	100,00%	1.058.045.821,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/berat		6 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				306.152.200,00	100,00%	306.152.200,00	100,00%	306.152.200,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah		4 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				74.858.600,00	100,00%	74.858.600,00	100,00%	74.858.600,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah		2 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				82.570.800,00	100,00%	82.570.800,00	100,00%	82.570.800,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1 Ruang		100,00%		100,00%		100,00%	
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				3.043.764.775,00	100,00%	3.043.764.775,00	100,00%	3.029.339.058,00	100,00%	99,53%
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	Pengadaan Mebel Sekolah				1.953.302.600,00	100,00%	1.953.302.600,00	100,00%	1.952.672.600,00	100,00%	99,97%
				Jumlah Mebel sekolah yang		1.045 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah				8.588.218.000,00	100,00%	8.588.218.000,00	100,00%	8.461.076.300,00	100,00%	98,52%
				Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil		5.600 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan				90.900.000,00	100,00%	90.900.000,00	100,00%	81.985.502,00	100,00%	90,19%
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				384.123.001,00	100,00%	384.123.001,00	100,00%	270.853.565,00	100,00%	70,51%
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga		3 Paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		13	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1.111.726.500,00	100,00%	1.111.726.500,00	100,00%	1.110.519.237,00	100,00%	99,89%
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses		167 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		14	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang				305.098.750,00	100,00%	305.098.750,00	100,00%	301.658.750,00	100,00%	98,87%
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses		92 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				282.640.000,00	100,00%	282.640.000,00	100,00%	282.578.351,00	100,00%	99,98%
				Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan		167 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		16	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa				808.220.000,00	100,01%	808.220.000,00	100,01%	808.220.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba		1.500 Peserta		0,00%		100,01%		0,00%	
		17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah				4.288.907.000,00	100,00%	4.288.907.000,00	100,00%	4.271.769.000,00	100,00%	99,60%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia		156 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				97.921.000,00	100,00%	97.921.000,00	100,00%	97.616.500,00	100,00%	99,69%
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen		165 Satuan pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				39.057.501.154,00	100,00%	39.057.501.154,00	100,00%	38.508.614.041,00	100,00%	98,59%
				Jumlah Sekolah Dasar yang		165 Satuan		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				31.492.059.446,00	100,00%	31.492.059.446,00	100,00%	30.450.006.440,00	100,00%	96,69%
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah		21.057 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		21	Pembangunan Laboratorium				1.533.574.511,00	100,00%	1.533.574.511,00	100,00%	1.532.794.461,00	100,00%	99,95%
				Jumlah Ruang Laboratorium		3 ruang		0,00%		100,00%		0,00%	
		22	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				694.806.475,00	100,00%	694.806.475,00	100,00%	694.796.475,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah		2 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				764.236.160,00	100,00%	764.236.160,00	100,00%	764.235.160,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Yang Telah		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		24	Pengadaan Mebel Sekolah				937.280.000,00	100,00%	937.280.000,00	100,00%	937.279.298,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Mebel Sekolah Yang		556 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		25	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				720.390.000,00	100,00%	720.390.000,00	100,00%	720.250.000,00	100,00%	99,98%
				Jumlah Alat Rumah Tangga		72 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		26	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt				11.662.750.000,00	100,00%	11.662.750.000,00	100,00%	11.564.750.000,00	100,00%	99,16%
				Jumlah peserta didik SMP yang menerima biaya personil		5.992 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1.870.860.000,00	100,00%	1.870.860.000,00	100,00%	1.844.324.200,00	100,00%	98,58%
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga		101 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		28	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				316.621.368,00	100,00%	316.621.368,00	100,00%	316.436.368,00	100,00%	99,94%
				Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan		24.024 peserta		0,00%		100,00%		0,00%	
		29	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				248.063.000,00	100,00%	248.063.000,00	100,00%	246.944.000,00	100,00%	99,55%
				Jumlah satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap		65 sekolah		0,00%		100,00%		0,00%	
		30	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				905.525.375,00	100,00%	905.525.375,00	100,00%	864.657.500,00	100,00%	95,49%
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba		750 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				93.739.000,00	100,00%	93.739.000,00	100,00%	92.735.000,00	100,00%	98,93%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan		59 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				12.585.664.804,00	100,00%	12.585.664.804,00	100,00%	12.520.104.385,00	100,00%	99,48%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana		41 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%	
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				2.095.587.791,00	100,00%	2.095.587.791,00	100,00%	2.015.082.814,00	100,00%	96,16%
				Pengelolaan Dana BOS SMP		1 Satuan		0,00%		100,00%		0,00%	
		34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2				1.940.024.073,00	100,00%	1.940.024.073,00	100,00%	1.545.737.634,00	100,00%	79,68%
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana		1 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%	
		35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3				1.522.192.860,00	100,00%	1.522.192.860,00	100,00%	1.396.936.461,00	100,00%	91,77%
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	

		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp	Jumlah siswa yang terlayani KBM		1 Satuan	1.291.835.892,00	100,00% 0,00%	1.291.835.892,00	100,00% 100,00%	1.257.606.714,00	100,00% 0,00%	97,35%
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di		922 Satuan Pendidikan	2.611.227.141,00	100,00% 0,00%	2.611.227.141,00	100,00% 100,00%	2.072.525.358,00	100,00% 0,00%	79,37%
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar SMP		1 Satuan Pendidikan	1.823.200.338,00	100,00% 0,00%	1.823.200.338,00	100,00% 100,00%	1.782.758.813,00	100,00% 0,00%	97,78%
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Mengelola dana		1 Satuan Pendidikan	1.567.700.000,00	100,00% 0,00%	1.567.700.000,00	100,00% 100,00%	1.548.218.454,00	100,00% 0,00%	98,76%
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di		1 Satuan Pendidikan	2.620.408.516,00	99,99% 0,00%	2.620.408.516,00	99,99% 100,00%	2.588.542.984,00	100,00% 0,00%	98,78%
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama		1 Satuan Pendidikan	1.774.680.019,00	100,00% 0,00%	1.774.680.019,00	100,00% 100,00%	1.738.881.630,00	100,00% 0,00%	97,98%
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10	Jumlah Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Menengah Pertama		100 Satuan Pendidikan	1.890.003.237,00	100,00% 0,00%	1.890.003.237,00	100,00% 100,00%	1.827.441.042,00	100,00% 0,00%	96,69%
		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11	Jumlah Sekolah Menengan Pertama yang Mengelola Dana		1 Satuan Pendidikan	1.193.822.675,00	100,01% 0,00%	1.193.822.675,00	100,01% 100,01%	1.155.561.638,00	100,00% 0,00%	96,80%
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di		483 Siswa	1.532.560.424,00	100,00% 0,00%	1.532.560.424,00	100,00% 100,00%	1.472.604.919,00	100,00% 0,00%	96,09%
		45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13	Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		1 Satuan Pendidikan	1.212.653.974,00	100,00% 0,00%	1.212.653.974,00	100,00% 100,00%	1.190.098.481,00	100,00% 0,00%	98,14%
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp	Jumlah siswa yang terlayani di		1 Satuan	1.181.670.437,00	100,00% 0,00%	1.181.670.437,00	100,00% 100,00%	1.155.697.863,00	100,00% 0,00%	97,80%
		47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp	Jumlah siswa yang terlayani KBM		1 Satuan	2.703.342.760,00	100,00% 0,00%	2.703.342.760,00	100,00% 100,00%	2.591.162.868,00	100,00% 0,00%	95,85%
		48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di		1 Satuan Pendidikan	1.925.093.914,00	100,00% 0,00%	1.925.093.914,00	100,00% 74,78%	1.671.608.965,00	100,00% 0,00%	86,83%
		49	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah		5.154 Orang	7.867.500.000,00	100,00% 100,00%	7.867.500.000,00	100,00% 100,00%	7.867.500.000,00	100,00% 100,00%	100,00%

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		50	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah		4 unit	581.753.863,00	99,99%	581.753.863,00	99,99%	552.755.639,00	100,00%	95,02%
								0,00%		100,00%		0,00%	
		51	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil		763 orang	1.638.100.000,00	100,00%	1.638.100.000,00	100,00%	1.631.500.000,00	100,00%	99,60%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		52	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga		18 paket	152.380.000,00	100,00%	152.380.000,00	100,00%	149.128.820,00	100,00%	97,87%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		53	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar		16.232 Peserta	2.517.385.000,00	100,00%	2.517.385.000,00	100,00%	2.502.069.000,00	100,00%	99,39%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan		224 Satuan Pendidikan	4.706.716.000,00	100,00%	4.706.716.000,00	100,00%	4.696.823.300,00	100,00%	99,79%
								0,00%		100,00%		0,00%	
		55	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola		691 Satuan	8.779.006.000,00	100,00%	8.779.006.000,00	100,00%	8.540.989.502,00	100,00%	97,29%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt	Jumlah peserta didik non formal/kesetaraan yang		250 orang	1.584.500.000,00	100,00%	1.584.500.000,00	100,00%	1.574.325.000,00	100,00%	99,36%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		57	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat		1.483 Peserta	838.275.000,00	100,00%	838.275.000,00	100,00%	838.085.000,00	100,00%	99,98%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,		120 Orang	433.350.000,00	100,00%	433.350.000,00	100,00%	427.650.000,00	100,00%	98,68%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		59	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang mengelola		16 Satuan Pendidikan	2.339.190.000,00	100,00%	2.339.190.000,00	100,00%	2.309.680.108,00	100,00%	98,74%
								100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam		851 Orang	851.000.000,00	100,00%	851.000.000,00	100,00%	826.526.123,00	100,00%	97,12%
								100,00%		107,00%		107,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		61	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana BOP Sekolah Nonformal		251 peserta didik	1.046.020.000,00	100,00%	1.046.020.000,00	100,00%	869.237.047,00	100,00%	83,10%
								0,00%		100,00%		0,00%	

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		62	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				153.719.000,00	100,00%	153.719.000,00	100,00%	153.719.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		1 ruang		0,00%		100,00%		0,00%	
		63	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				179.948.800,00	100,00%	179.948.800,00	100,00%	179.948.800,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi		2 Ruang		0,00%		100,00%		0,00%	
		64	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				1.212.105.130,00	100,00%	1.212.105.130,00	100,00%	1.207.540.777,00	100,00%	99,62%
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah		8 Konten Digital		0,00%		100,00%		0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,10%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100%**	**97,15 %**	**40.449.002.500,00**	**97.15%**	**40.449.002.500,00**	**100%**	**40.182.715.835,00**	**102.93%**	**99,35%**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan				18.969.085.750,00	100,00%	18.969.085.750,00	100,00%	18.912.477.835,00	100,00%	99,70%
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan				21.479.916.750,00	100,00%	21.479.916.750,00	100,00%	21.270.238.000,00	100,00%	99,02%
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,36%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dibagi jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dikali 100%)**	**58,17 %**	**3.456.840.800,00**	**58.17%**	**3.456.840.800,00**	**64.59%**	**3.480.166.452,00**	**111.04%**	**98,29%**
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				111.830.000,00	100,00%	111.830.000,00	100,00%	111.830.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				232.100.000,00	100,00%	232.100.000,00	100,00%	232.100.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan		4.315 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				664.432.680,00	100,00%	664.432.680,00	100,00%	659.909.810,00	100,00%	99,32%
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan		19.860 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan				561.760.000,00	100,00%	561.760.000,00	100,00%	548.260.000,00	100,00%	97,60%
				Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses		45.815 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				1.502.045.000,00	100,00%	1.502.045.000,00	100,00%	1.567.351.800,00	100,00%	104,35%
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar		46 orang		0,00%		100,00%		0,00%	

		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		6	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				384.673.120,00	100,00%	384.673.120,00	100,00%	360.714.842,00	100,00%	93,77%
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,17%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Persentase kapasitas daya saing keolahragaan**	**rerata persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional, persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif, persentase perolehan medali tingkat propinsi/nasional, persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik**	**83,00 %**	**18.496.168.350,00**	**83.00%**	**18.496.168.350,00**	**64.54%**	**18.266.946.450,00**	**77.75%**	**98,00%**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga				526.790.769,00	100,00%	526.790.769,00	100,00%	625.620.769,00	100,00%	118,76%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang		12 Unit		0,00%		300,00%		0,00%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				677.448.000,00	100,00%	677.448.000,00	100,00%	654.817.000,00	100,00%	96,66%
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah		7 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
		3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				444.150.000,00	100,00%	444.150.000,00	100,00%	416.734.500,00	100,00%	93,83%
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah		8 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
		4	Seleksi Atlet Daerah				1.567.997.000,00	100,00%	1.567.997.000,00	100,00%	1.565.400.000,00	100,00%	99,83%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat		5		0,00%		100,00%		0,00%	
		5	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				1.573.096.000,00	100,00%	1.573.096.000,00	100,00%	1.554.930.000,00	100,00%	98,85%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				82.212.000,00	100,00%	82.212.000,00	100,00%	81.512.000,00	100,00%	99,15%
				Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
		7	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				13.860.000,00	100,00%	13.860.000,00	100,00%	13.860.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		8	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				10.905.801.850,00	100,00%	10.905.801.850,00	100,00%	10.695.301.471,00	100,00%	98,07%
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi		2 Organisasi		0,00%		87,45%		0,00%	

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
		9	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan				1.124.005.000,00	100,00%	1.124.005.000,00	100,00%	1.098.825.000,00	100,00%	97,76%
				Pembinaan Dan Pengembangan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
		10	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				287.694.845,00	100,00%	287.694.845,00	100,00%	273.916.942,00	100,00%	95,21%
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				1.046.684.886,00	100,00%	1.046.684.886,00	100,00%	1.044.385.953,00	100,00%	99,78%
				Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan		8 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		12	Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan				246.428.000,00	100,00%	246.428.000,00	100,00%	241.642.815,00	100,00%	98,06%
				Pembinaan Dan Pengembangan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,66%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**(Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) / Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) x 100%)**		**95,00 %**	**278.935.000,00**	**95.05%**	**278.935.000,00**	**100%**	**278.935.000,00**	**105.26%**	**100,00%**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
		1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				278.935.000,00	100,00%	278.935.000,00	100,00%	278.935.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat		2 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**		**A huruf**	**235.614.235.008,00**	**A huruf**	**235.614.235.008,00**	**A huruf**	**219.382.891.502,00**	**100%**	**93,02%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.745.000,00	100,00%	3.745.000,00	100,00%	3.745.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Perencanaan		4 Dokuem		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.760.800,00	100,00%	7.760.800,00	100,00%	7.760.750,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokuem		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.025.750,00	100,00%	6.025.750,00	100,00%	6.025.750,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		2 Dokuem		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.160.000,00	100,00%	5.160.000,00	100,00%	5.160.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokuem		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4.592.500,00	100,00%	4.592.500,00	100,00%	4.592.500,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		2 Dokuem		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.045.000,00	100,00%	3.045.000,00	100,00%	3.045.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.675.000,00	100,00%	16.675.000,00	100,00%	16.675.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				228.699.896.000,00	100,00%	228.699.896.000,00	100,00%	212.601.014.398,00	100,00%	92,96%
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		2.230 Orang/Bula		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.060.000,00	100,00%	11.060.000,00	100,00%	11.009.000,00	100,00%	99,54%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.280.000,00	100,00%	5.280.000,00	100,00%	5.280.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	10.455.000,00	100,00%	99,57%
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.080.000,00	100,00%	2.080.000,00	100,00%	2.080.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				190.055.000,00	100,00%	190.055.000,00	100,00%	189.876.000,00	100,00%	99,91%
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.740.000,00	100,00%	99,73%
				Jumlah Rencana Kebutuhan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.539.000,00	100,00%	94,37%
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.603.000,00	100,00%	96,08%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaan Barang Milik		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%	98,13%
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	92,80%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.615.000,00	100,00%	96,40%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.735.000,00	100,00%	99,60%
				Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasidan Penilaian Kinerja		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				74.723.850,00	100,00%	74.723.850,00	100,00%	74.714.200,00	100,00%	99,99%
				Jumlah Paket Kompone Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		45 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				234.649.084,00	100,00%	234.649.084,00	100,00%	230.015.334,00	100,00%	98,03%
				Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang		60 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				94.385.050,00	100,00%	94.385.050,00	100,00%	94.172.200,00	100,00%	99,77%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.095.700,00	100,00%	58.095.700,00	100,00%	49.063.200,00	100,00%	84,45%
				Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				26.660.000,00	100,00%	26.660.000,00	100,00%	26.360.500,00	100,00%	98,88%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				633.500.000,00	100,00%	633.500.000,00	100,00%	633.478.633,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		83 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				647.081.305,00	100,00%	647.081.305,00	99,99%	596.037.300,00	99,99%	92,11%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		100 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				130.061.000,00	100,00%	130.061.000,00	100,00%	120.572.128,00	100,00%	92,70%
				Jumlah Laporan Penyediaan		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				55.200.000,00	100,00%	55.200.000,00	100,00%	46.513.810,00	100,00%	84,26%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				962.774.700,00	100,01%	962.774.700,00	100,01%	893.595.260,00	100,00%	92,81%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan		0,00%		114,70%		0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				285.289.500,00	100,00%	285.289.500,00	100,00%	228.982.490,00	100,00%	80,26%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknyaeliharaan dan Pajak Kendaraan		75 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas				260.922.000,00	100,00%	260.922.000,00	100,00%	224.618.629,00	100,00%	86,09%
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				378.940.000,00	100,00%	378.940.000,00	100,00%	290.388.420,00	100,00%	76,63%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		225 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.776.147.769,00	100,01%	2.776.147.769,00	100,01%	2.978.589.000,00	100,00%	107,29%
				Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang		3 Unit		0,00%		108,80%		0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**96,18%**
					Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat Tinggi**
					Total anggaran dari seluruh program		**488.041.721.089,00**		**488.041.721.089,00**		**466.797.505.352,00**		
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**100,00%**	**95,65%**
					Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: ketercapaian indikator dan sub kegiatan baik fisik maupun keuangan didukung dengan ketersediaan data, dan adanya komitmen dan konsistensi dari semua PPTK untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan waktu yang ditentukan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, seperti : 1. indikator PAUD terakreditasi minimal B, dari 491 masih terealisasi sebanyak 307, karena penentuan akreditasi tergantung hasil validasi dari BAN Pusat. 2. APK dan APM SD dan SMP ,masih perlu menghitung kembali data yang disajikan dan perlu dilakukan koordinasi lintas kabupaten untuk mendapatkan data jumlah penduduk kota yang bersekolah di luar kota
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Masih ada indikator program yang belum tercapai berdasarkan data yang disampaikan saat desk. Agar Dindikpora bisa menindaklanjuti dengan melihat kembali perhitungan metadata serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator program.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Masih ada formulasi indikator pada persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sehingga formulasi perlu disesuiakan ketika ada review dokumen terkait.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	77.28 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	57.77 skor
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	88.20 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	83.39 skor
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.85%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	90.25%
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**A**	**249.612.489.885,00**	**A**	**249.612.489.885,00**	**A**	**234.009.049.145,00**	**100%**	**93,79%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				81.925.000,00	100,00%	81.925.000,00	100,00%	81.778.960,00	100,00%	99,82%
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.464.000,00	100,00%	5.464.000,00	100,00%	5.464.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penysunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.073.000,00	100,00%	7.073.000,00	100,00%	7.073.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.313.000,00	100,00%	2.313.000,00	100,00%	2.313.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36.714.000,00	100,00%	36.714.000,00	100,00%	36.714.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.241.900,00	100,00%	23.241.900,00	100,00%	23.241.900,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				242.349.426.000,00	100,00%	242.349.426.000,00	100,00%	226.926.346.652,00	100,00%	93,64%
				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.230 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9.054.000,00	100,00%	9.054.000,00	100,00%	9.054.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.626.000,00	100,00%	10.626.000,00	100,00%	10.615.000,00	100,00%	99,90%
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.538.000,00	100,00%	99,89%
				Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				181.160.000,00	100,01%	181.160.000,00	100,01%	181.160.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	100,00%	98,76%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.287.000,00	100,00%	75,71%
				Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.309.000,00	100,00%	77,00%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	100,00%	98,76%
				Jumlah Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	100,00%	76,35%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	100,00%	76,35%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.671.000,00	100,00%	98,29%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.345.450,00	100,00%	80.345.450,00	100,00%	77.807.000,00	100,00%	96,84%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				171.389.680,00	100,00%	171.389.680,00	100,00%	169.981.850,00	100,00%	99,18%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		60 Paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				62.866.500,00	100,00%	62.866.500,00	100,00%	57.475.840,00	100,00%	91,43%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.346.600,00	100,00%	40.346.600,00	100,00%	39.863.200,00	100,00%	98,80%
				Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				19.600.000,00	100,00%	19.600.000,00	100,00%	19.600.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				570.160.000,00	100,00%	570.160.000,00	100,00%	554.856.314,00	100,00%	97,32%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		83 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			605.128.900,00	100,01%	605.128.900,00	100,01%	582.154.000,00	100,00%	96,20%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit		0,00%		98,79%		0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			122.238.600,00	100,00%	122.238.600,00	100,00%	120.113.600,00	100,00%	98,26%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			9.240.000,00	100,00%	9.240.000,00	100,00%	5.231.169,00	100,00%	56,61%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		100,00%		101,00%		101,00%	
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.001.462.000,00	100,00%	1.001.462.000,00	100,00%	996.653.240,00	100,00%	99,52%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan		0,00%		113,25%		0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			49.185.000,00	100,00%	49.185.000,00	100,00%	46.108.803,00	100,00%	93,75%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	75 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			515.296.700,00	99,99%	515.296.700,00	99,99%	419.928.850,00	100,00%	81,49%
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		0,00%		99,99%		0,00%	
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			380.150.000,00	99,99%	380.150.000,00	99,99%	363.353.111,00	100,00%	95,58%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225 Unit		0,00%		87,72%		0,00%	
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.244.006.655,00	100,00%	3.244.006.655,00	100,00%	3.239.767.756,00	100,00%	99,87%
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
				Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**94,43%**
				Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar /Jumlah**	**100,00 %**	**205.499.317.888,00**	**100%**	**205.499.317.888,00**	**100%**	**198.825.366.022,00**	**100%**	**97,62%**
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	**Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi**	**97,61 %**	**0,00**	**97.61**	**0,00**	**98.16**	**0,00**	**100,56%**	**0,00%**
			Persentase Kelulusan warga belajar	**Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	**(jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah**	**99,39 %**	**0,00**	**99,39**	**0,00**	**100**	**0,00**	**101,01%**	**0,00%**
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**(jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Kasar SD	**(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**105,24 %**	**0,00**	**105.24**	**0,00**	**110.91**	**0,00**	**105,39%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Murni SD	**APM SD = (Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Kasar SMP	**APK SMP = (Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15**	**112,41 %**	**0,00**	**112.41**	**0,00**	**123.74**	**0,00**	**110,08%**	**0,00%**
			Angka Partisipasi Murni SMP	**APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
		1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				323.887.185,00	100,00%	323.887.185,00	100,00%	323.887.185,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		1 ruang		0,00%		100,00%		0,00%	
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				1.202.536.562,00	100,00%	1.202.536.562,00	100,00%	1.202.515.502,00	100,00%	100,00%
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		6 Konten digital		0,00%		100,00%		0,00%	
		3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				61.874.400,00	100,00%	61.874.400,00	100,00%	60.931.188,00	100,00%	98,48%
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yaang dilaksanakan		210 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				129.594.000,00	100,01%	129.594.000,00	100,01%	129.557.110,00	100,00%	99,97%
				Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan		4 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				37.840.000,00	100,00%	37.840.000,00	100,00%	37.840.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		21 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				320.367.000,00	100,01%	320.367.000,00	100,01%	315.655.527,00	100,00%	98,53%
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4 Kegiatan		0,00%		100,01%		0,00%	
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.999.421.510,00	100,01%	2.999.421.510,00	100,01%	2.985.026.488,00	100,00%	99,52%
				Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab		10 unit		0,00%		100,01%		0,00%	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				1.372.584.000,00	99,99%	1.372.584.000,00	99,99%	1.355.276.426,00	100,00%	98,74%
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		167 satuan pendidik		0,00%		99,99%		0,00%	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				191.442.750,00	100,00%	191.442.750,00	100,00%	191.442.750,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaran Proses Belajar		105 Satuan Pendidikan		0,00%		76,49%		0,00%	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				176.608.000,00	100,00%	176.608.000,00	100,00%	176.608.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		143 orang		0,00%		113,17%		0,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				22.780.000,00	100,00%	22.780.000,00	100,00%	22.780.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi		13 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				259.508.900,00	100,00%	259.508.900,00	100,00%	237.092.900,00	100,00%	91,36%
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65 sekolah		0,00%		100,72%		0,00%	
		13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				361.457.000,00	100,01%	361.457.000,00	100,01%	345.279.500,00	100,00%	95,52%
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65 sekolah		0,00%		100,01%		0,00%	

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				90.359.800,00	100,00%	90.359.800,00	100,00%	78.705.800,00	100,00%	87,10%
				Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		118 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				99.000.000,00	100,00%	99.000.000,00	100,00%	98.978.000,00	100,00%	99,98%
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				38.487.800,00	100,00%	38.487.800,00	100,00%	38.475.800,00	100,00%	99,97%
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi		10 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				56.229.700,00	100,00%	56.229.700,00	100,00%	56.229.700,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				416.217.100,00	100,01%	416.217.100,00	100,01%	387.309.900,00	100,00%	93,05%
				Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		1.801 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		19	Pengadaan Mebel Sekolah				1.152.604.000,00	100,00%	1.152.604.000,00	100,00%	1.151.671.600,00	100,00%	99,92%
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		660 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah				1.338.317.900,00	99,99%	1.338.317.900,00	99,99%	1.254.913.900,00	100,00%	93,77%
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		6 paket		0,00%		99,99%		0,00%	
		21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah				5.638.600.000,00	100,00%	5.638.600.000,00	100,00%	5.580.200.000,00	100,00%	98,96%
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		5.554 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1.975.112.900,00	99,99%	1.975.112.900,00	100,00%	1.926.840.500,00	100,01%	97,56%
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		13 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				752.141.700,00	100,00%	752.141.700,00	100,00%	749.611.700,00	100,00%	99,66%
				Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1.500 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				4.883.132.000,00	100,00%	4.883.132.000,00	100,00%	4.819.579.000,00	100,00%	98,70%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan		200 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				71.410.000,00	100,00%	71.410.000,00	100,00%	71.410.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Pendidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		85 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				108.923.800,00	100,00%	108.923.800,00	100,00%	103.000.800,00	100,00%	94,56%
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		165 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				38.309.239.144,00	99,99%	38.309.239.144,00	99,99%	35.979.516.832,00	100,00%	93,92%
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		100%		0,00%		99,99%		0,00%	
		28	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				30.923.267.300,00	100,01%	30.923.267.300,00	100,01%	30.184.606.181,00	100,00%	97,61%
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		30.672 Orang		0,00%		100,01%		0,00%	

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				783.866.000,00	100,01%	783.866.000,00	100,01%	779.356.504,00	100,00%	99,42%
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Unit		0,00%		100,01%		0,00%	
		30	Pengadaan Mebel Sekolah				1.145.406.000,00	100,00%	1.145.406.000,00	100,00%	1.145.177.000,00	100,00%	99,98%
				Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia		578 paket		0,00%		100,00%		0,00%	
		31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah				15.419.500.000,00	100,00%	15.419.500.000,00	100,00%	15.346.840.100,00	100,00%	99,53%
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		6.237 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		32	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				997.901.500,00	100,02%	997.901.500,00	100,02%	880.760.000,00	100,00%	88,26%
				Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		750 Peserta didik		0,00%		100,02%		0,00%
		33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				20.294.477.500,00	100,01%	20.294.477.500,00	100,01%	19.947.128.500,00	100,00%	98,29%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.905 Orang		0,00%		100,01%		0,00%	
		34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				391.283.500,00	100,00%	391.283.500,00	100,00%	391.262.500,00	100,00%	99,99%
				Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan		375 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				86.192.900,00	100,00%	86.192.900,00	100,00%	85.398.400,00	100,00%	99,08%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		58 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				12.068.084.233,00	100,00%	12.068.084.233,00	100,00%	11.921.737.237,00	100,00%	98,79%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		41 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%	
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1				2.065.009.561,00	100,01%	2.065.009.561,00	100,01%	1.852.936.713,00	100,00%	89,73%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		99,64%		0,00%	
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2				1.744.761.898,00	100,01%	1.744.761.898,00	100,01%	1.465.679.222,00	100,00%	84,00%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,01%		0,00%	
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3				1.535.132.860,00	99,99%	1.535.132.860,00	99,99%	1.416.213.411,00	100,00%	92,25%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		99,99%		0,00%	
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4				1.289.700.000,00	100,00%	1.289.700.000,00	100,00%	1.255.540.626,00	100,00%	97,35%
				Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 satuan		0,00%		100,00%		0,00%	
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5				2.759.527.141,00	100,00%	2.759.527.141,00	100,00%	2.789.818.829,00	100,00%	101,10%
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6				1.791.233.838,00	100,00%	1.791.233.838,00	100,00%	1.755.629.763,00	100,00%	98,01%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	

		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7				1.543.035.774,00	100,00%	1.543.035.774,00	100,00%	1.427.491.448,00	100,00%	92,51%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8				2.589.748.516,00	100,00%	2.589.748.516,00	100,00%	2.484.596.354,00	100,00%	95,94%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9				1.859.800.000,00	99,99%	1.859.800.000,00	99,99%	1.807.736.876,00	100,00%	97,20%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10				1.933.183.237,00	100,00%	1.933.183.237,00	100,00%	1.673.079.984,00	100,00%	86,55%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		99,99%		0,00%	
		47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11				1.126.707.661,00	100,00%	1.126.707.661,00	100,00%	1.055.116.774,00	100,00%	93,65%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		97,97%		0,00%	
		48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12				1.576.689.122,00	99,99%	1.576.689.122,00	99,99%	1.539.041.590,00	100,00%	97,61%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		99,99%		0,00%	
		49	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13				1.215.742.099,00	100,00%	1.215.742.099,00	100,00%	1.177.904.836,00	100,00%	96,89%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		50	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14				1.141.705.823,00	99,99%	1.141.705.823,00	99,99%	1.135.361.986,00	100,00%	99,44%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		51	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15				2.670.292.214,00	100,00%	2.670.292.214,00	100,00%	2.304.342.629,00	100,00%	86,30%
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS		1 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		52	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16				1.771.415.542,00	100,00%	1.771.415.542,00	100,00%	1.583.839.386,00	100,00%	89,41%
				Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				7.486.500.000,00	100,00%	7.486.500.000,00	100,00%	7.461.057.302,00	100,00%	99,66%
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		4.415 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		54	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD				188.132.145,00	100,00%	188.132.145,00	100,00%	187.314.719,00	100,00%	99,57%
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun		1 unit		0,00%		99,98%		0,00%	
		55	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD				340.278.073,00	99,99%	340.278.073,00	99,99%	337.271.808,00	100,00%	99,12%
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 unit		0,00%		99,99%		0,00%	
		56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah				1.883.200.000,00	100,00%	1.883.200.000,00	100,00%	1.830.700.000,00	100,00%	97,21%
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2.025 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				178.980.000,00	100,00%	178.980.000,00	93,54%	164.473.000,00	93,54%	91,89%
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		7 paket		0,00%		93,54%		0,00%	
		58	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				250.824.000,00	100,00%	250.824.000,00	100,00%	250.824.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD		14.357 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		59	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				1.918.950.000,00	100,00%	1.918.950.000,00	100,00%	1.893.000.000,00	100,00%	98,65%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		529 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		60	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				73.861.800,00	100,00%	73.861.800,00	100,00%	73.861.800,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%	

		61	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				4.420.787.500,00	100,00%	4.420.787.500,00	100,00%	4.414.201.697,00	100,00%	99,85%
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		691 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%	
		62	Pengelolaan Dana BOP PAUD				8.645.822.000,00	100,00%	8.645.822.000,00	100,00%	8.312.731.794,00	100,00%	96,15%
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		387 Satuan		0,00%		100,00%		0,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah				1.442.750.000,00	100,00%	1.442.750.000,00	100,00%	1.434.375.000,00	100,00%	99,42%
				Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		419 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%	
		64	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				434.266.000,00	100,00%	434.266.000,00	100,00%	319.191.000,00	100,00%	73,50%
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		45 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		65	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				2.159.280.000,00	100,00%	2.159.280.000,00	100,00%	2.131.780.974,00	100,00%	98,73%
				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		16 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
		66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				848.000.000,00	100,00%	848.000.000,00	100,00%	833.197.526,00	100,00%	98,25%
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		763 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb				1.036.160.000,00	99,99%	1.036.160.000,00	99,99%	1.016.275.945,00	100,00%	98,08%
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan		251 peserta didik		0,00%		99,99%		0,00%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		68	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1.078.185.000,00	100,00%	1.078.185.000,00	100,00%	1.078.176.500,00	100,00%	100,00%
				Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang Tersedia		34 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**99,91%**	**96,59%**
					Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100%**	**100,00 %**	**16.026.291.400,00**	**100%**	**16.026.291.400,00**	**100%**	**15.849.078.400,00**	**100%**	**98,89%**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				255.004.400,00	100,00%	255.004.400,00	100,00%	254.997.400,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		8 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				15.771.287.000,00	100,00%	15.771.287.000,00	100,00%	15.594.081.000,00	100,00%	98,88%
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,44%**
					Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di**	**67,11 %**	**2.457.421.625,00**	**67.11%**	**2.457.421.625,00**	**66.47%**	**2.445.949.747,00**	**99.05%**	**99,51%**
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		40 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		2	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				394.749.500,00	99,99%	394.749.500,00	99,99%	394.749.500,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		4.315 orang		0,00%		99,99%		0,00%	

		3	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				417.834.600,00	100,01%	417.834.600,00	100,01%	416.114.600,00	100,00%	99,59%
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1.986.000 orang		0,00%		100,01%		0,00%	
		4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa				590.594.600,00	100,01%	590.594.600,00	100,01%	587.859.600,00	100,00%	99,54%
				Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi, Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		45.815 orang		0,00%		100,01%		0,00%	
		5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				312.935.625,00	100,00%	312.935.625,00	99,99%	306.678.747,00	99,99%	98,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%	
		6	Peningkatan KepemimpinanKepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				215.356.800,00	100,00%	215.356.800,00	100,00%	214.596.800,00	100,00%	99,65%
				Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		100 orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		7	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				374.480.000,00	99,99%	374.480.000,00	99,99%	374.480.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,54%**
					Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Persentase kapasitas daya saing keolahragaan**	**rerata ((persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Nasional) + (persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif) + (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum**	**67,68 %**	**17.410.420.420,00**	**67.68%**	**17.410.420.420,00**	**63.73%**	**16.847.268.573,00**	**94.16%**	**95,87%**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
		1	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				480.346.780,00	100,00%	480.346.780,00	100,00%	479.546.780,00	100,00%	99,83%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan		12 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				578.219.000,00	100,00%	578.219.000,00	100,00%	565.461.000,00	100,00%	97,79%
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
		3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				431.762.500,00	100,00%	431.762.500,00	100,00%	400.946.000,00	100,00%	92,86%
				Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		300 Orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
		4	Seleksi Atlet Daerah				1.504.624.000,00	99,99%	1.504.624.000,00	99,99%	1.468.110.000,00	100,00%	97,57%
				Jumlah Atlet yang Diseleksi		300 Orang		0,00%		100,17%		0,00%	
		5	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				1.952.350.400,00	100,00%	1.952.350.400,00	100,00%	1.862.127.400,00	100,00%	95,38%
				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		266 Orang		0,00%		100,00%		0,00%	
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				67.668.000,00	100,00%	67.668.000,00	100,00%	67.668.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
		7	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				24.480.000,00	100,00%	24.480.000,00	100,00%	24.480.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
		8	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				9.036.200.000,00	100,00%	9.036.200.000,00	100,00%	9.036.200.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		2 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
		9	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1.028.540.000,00	100,00%	1.028.540.000,00	100,00%	853.440.000,00	100,00%	82,98%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
		10	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	

		11	PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				1.774.046.740,00	100,00%	1.774.046.740,00	100,00%	1.558.223.393,00	100,00%	87,83%
				Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
		12	Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan				282.183.000,00	100,00%	282.183.000,00	100,00%	281.066.000,00	100,00%	99,60%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**96,15%**
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) /Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus**	**100,00 %**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**97,63%**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
		1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**100,00%**
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program							**491.305.941.218,00**		**491.305.941.218,00**		**468.276.711.887,00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)												**99,95%**	**95,31%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: rekomendasi tindaklanjut triwulan sebelumnya sudah kami tindaklanjuti, sudah kami informasikan dan sudah kami koordinasikan ke semua PPTK dan petugas Urusannya untuk dapat segera menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan tatakala yang sudah dibuat untuk pemetaan /identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendiidkan terkait pengadaan melalui e katalog sudah dilakukan melalui koordinasi dengan Adminbang dan PBJ, dan sudah mendapatkan jalan keluar, yaitu jika dalam belanja pengadaan khususnya di jenjang SD, bisa menggunakan e katalog sebagai referensi dan surat pernyataan dari penyedia.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: sampai dengan akhir tahun 2024, masih ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%, karena waktu pelaksanaannya tidak mencukupi di akhir tahun, masih ada sisa anggaran hasil negoisasi dengan pihak ketiga, masih ada silpa untuk kegiatan BOSP, Tamsil, TPG untuk pengadaan melalui e katalog, masih ada beberapa kendala seperti ketersediaan barang, spek barang , kualitas barang sampai ke harga barang yang tidak sesuai yang di inginkan, mengingat penyesuaian anggaran yang dimiliki
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Hasil evaluasi terkait pencapaian hasil evaluasi renja TW 4 ini ada 4 indikator sasaran dan 2 program yang belum tercapai berkaitan dengan literasi dan numerasi tingkat SD dan SMP serta persentase kapasitas pemuda olahraga dan kepramukaan yang aktif. Berdasarkan desk hal ini disebabkan karena target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga sebagai tindak lanjut tw berikutnya. Agar dinas pendidikan mencari akar permasalahan ketidaktercapaian indikator literasi dan numerasi dengan melakukan konfirmasi ke sekolah SD dan SMP sebgai pemilik akun rapor pendidikan satuan pendidikan. Dinas pendidikan juga perlu melakukan tindak lanjut melalui desain kegiatan untuk menjawab akar permasalahan berkaitan tendik yang ada di rapor pendidikan daerah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar dinas pendidikan mempersiapkan indikator yang akan dipergunakan dalam penyusunan renstra dinas pendidikan, dan mencermati lebih detail terkait pentargetan dengan sumber data yang cukup untuk melakukan proyeksi 5 tahun kedepannya. Terutama untuk indikator yang belum tercapai di tahun 2024 ini dan akan digunakan kembali sebagai indikator di renstra.

Tabel. 1.19 Realisasi dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM pada bidang urusan Pendidikan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Persentase Warga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.20 Alokasi anggaran Pemenuhan SPM tahun 2020-2024 pada bidang urusan pendidikan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

PENDANAAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	350.490.644.363	336.286.388.976	455.278.008.338	420.772.647.734	473.957.989.392	451.934.225.306	488.041.721.089	466.584.914.705	491.505.941,218	469.804.576.625
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	107.882.919.917	95.015.692.853	202.419.383.166	190.793.209.075	227.475.445.871	213.817.022.651	227.475.445.871	213.817.022.651	221.725.609.288	216.247.704.216

Tabel. 1.21 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Meningkat	Persentase Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100%
		Persentase Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100%
2	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	135,81	132,60	97,64%
		Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	133,80	130,16	97,28%
		Angka Partisipasi Murni SD	Persen	127,68	130,13	101,92%
		Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	106,40	107,61	101,14%
		Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,99	99,99	100%

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Persentase	89	88	Sangat baik

Ditahun 2020, urusan pendidikan dan urusan pemuda olahraga belum menjadi satu dinas, sehingga data capaian IKU tercantum secara terpisah. Dan mulai di Tahun 2021 urusan pendidikan dan urusan olahraga sudah menjadi satu, yaitu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, adapun data IKU Dindikpora mulai tahun 2021-2024 sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
Tahun 2021

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	(40% Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 40% Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif + 20% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan)dikali 100	88.86	91.96	99	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai	peringkat 2	peringkat 1	peringkat 1	
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai	peringkat 2	peringkat 1	peringkat 1	
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn) x 100%	135.90	110.97	142.76	
		Angka partisipasi kasar SMP	(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%	133.92	123.75	141.5	
		Angka partisipasi murni SD	(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn) x 100%	130.16	105.83	130.21	
		Angka partisipasi murni SMP	(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%	107.68	110.81	107.89	
		Angka partisipasi sekolah	(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi	Target	Realisasi	OPD
1	2	3	4	5			6
1	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn) x 100%	Angka partisipasi kasar SD dihitung dari jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun, dikalikan 100%	110%	110%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka partisipasi kasar SMP	(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%	Angka partisipasi kasar SMP dihitung dari jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun, dikalikan 100%	123.00%	121,56%	
		Angka partisipasi murni SD	(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn) x 100%	Angka partisipasi murni SD dihitung dari jumlah siswa SD usia 7 - 12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dikalikan 100%	105%	105%	
		Angka partisipasi murni SMP	(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%	Angka partisipasi murni SMP dihitung dari jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dikalikan 100%	107,89 %	108.04	
		Angka partisipasi sekolah	(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%	Angka partisipasi sekolah dihitung dari Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah, dikalikan 100%	100,00 %	100	

2	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	(40% Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 40% Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif + 20% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan) dikali 100	Jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga; Keaktifan organisasi (data dari kecamatan)	99,00 %	98.06	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY dihitung dari perbandingan Rerata Ujian Sekolah Daerah antara lima kabupaten/kota se-DIY	1 peringkat	1 peringkat	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY dihitung dari perbandingan Rerata Ujian Sekolah Daerah antara lima kabupaten/kota se-DIY	1 peringkat	1 peringkat	

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Tahun 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi	Target	Realisasi	OPD
1	2	3	4	5			6
1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	53,94	91,58	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	40.27	77.33	

		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	63.12	93.59	
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	54.8	76.9	
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100 %	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dihitung dari jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 %	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun) x 100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dihitung dari jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100 %	88.66%	90.49%	
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	(10% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan + 20% Persentase kapasitas daya saing keolahragaan + 70% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan) dikali 100	Persentase kapasitas pemuda, olahraga dan kepramukaan yang aktif dihitung dari tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan, persentase kapasitas daya saing keolahragaan, dan persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	88.95	89.37	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi	Target	Realisasi	OPD
1	2	3	4	5			6
1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	77,28 score	76,43 score	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	57,77 score	56,07 score	
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	88,20 score	84,62 score	

		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)	83,39 score	73,15 score	
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100 %	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dihitung dari jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 %	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun) x 100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100%	100%	100%	

		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x100%	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dihitung dari jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100 %	88,85%	90,86%	
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	(10% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan + 20% Persentase kapasitas daya saing keolahragaan + 70% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan) dikali 100	Persentase kapasitas pemuda, olahraga dan kepramukaan yang aktif dihitung dari tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan, persentase kapasitas daya saing keolahragaan, dan persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	90,25	89,39	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	AA	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam menjalankan ketugasannya dalam urusan pendidikan pemuda dan olahraga tentu saja tidak bisa sendiri, perlu kerjsama dan kolaborasi dengan OPD Teknis maupun dengan badan dan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan pemuda dan olahraga.

Adapun OPD Teknis atau Badan atau Lembaga yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

   Dinas sosial berperan dalam menyediakan data ksjps untuk sasaran jaminan pendidikan daerah dan melakukan visitasi bagi calon penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan
2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

   Berperan dalam menyediakan data kependudukan yang digunakan untuk:

   b. PPDB online menggunakan data kependudukan untuk database dalam system

   c. Database kependudukan digunakan dalam aplikasi pendataan pendidikan yang dapat digunakan untuk menghitung angka partisipasi sekolah usia 5-6, usia 7-12 dan usia 7- 18 (kesetaraan), angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, jumlah penduduk usia 16-30 tahun untuk kepemudaan.
3. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

   Berperan dalam penentuan titik koordinat yang digunakan dalam sistem PPDB online
4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

   Berperan dalam sinergi program sekolah ramah, advokasi terhadap anak, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, anak mengalami kekerasan, dan pernikahan usia dini
5. DINAS KESEHATAN

   Berperan dalam sinergi vaksinasi bagi anak, program GERMAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah, pembinaan UKS, kegaitan Gerakan Sekolah Sehat, pembinaan dokter kecil, pembinaan palang merah remaja, dan pelibatan puskesmas dalam berbagai kegiatan event perlombaan.

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

   Berperan dalam pembinaan sekolah Adiwiyata (Tingkat Kota, Propinsi, Nasional)

7. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

   Berperan dalam mewujudkan peningkatan prasarana di sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi berat dan lainya.

8. DINAS KEBUDAYAAN

   Berperan dalam mewujudkan peningkatan prasarana di sekolah khusus untuk bangunan cagar budaya, peningkatan pendidikan karakter terkait penguatan budaya melalui pengadaan buku pendidikan khas jogja (PKJ) bersumber Dana Keistimewaan (DAIS)

9. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

   Berperan dalam memfasilitasi berbagai perijinan yang ada di sekolah seperti ijin pendirian satuan pendidikan.

10. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

    Berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung TIK di sekolah dan dinas, seperti penyediaan jaringan internet di sekolah dan di dinas, penyediaan jaringan hotspot wifi di satuan penidikan dan dinas, sebagai mitra dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi.

11. DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

    Berperan dalam kegiatan layanan kepemudaan (kewirausahaan muda)

12. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

    Berperan dalam sinergi penataan pegawai termasuk tenaga pendidikan di sekolah, fasilitasi beasiswa, ijin belajar, tugas belajar, pelatihan bagi pegawai/tenaga pendidikan, dan pelatihan untuk calon kepala sekolah.

13. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

    Berperan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan satuan pendidikan aman bencana (SPAB)

14. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

    Berperan dalam kegiatan berkaitan dengan kepemudaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pemantauan Orang Asing (POA), Pencegahan Konflik Sosial.

15. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    Berperan dalam sinergi penanggulangan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak

Dalam melaksanakan ketugasan urusan pendidikan pemuda dan olahraga, kami memberikan layanan baik secara internal dinas maupun di luar dinas, adapun sasaran yang mendapatkan layanan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

a. Internal Dinas: memberikan layanan kepada semua pegawai baik di dinas maupun di satuan pendidikan, seperti pemenuhan sarana prsarana, pelayanan kepegawaian (kenaikan pangkat, usulan diklat, gaji berkala, mutasi, dll)

b. Masyarakat : memberikan layanan kepada masyarakat khususnya warga Kota Yogyakarta, dalam hal pemberian bantuan sosial, memberikan layanan konsultasi belajar, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pendiidkan pemuda dan olahraga

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menghadapi hambatan sebagaimana berikut:

1. Akses
   a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah;
   b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan faktor lingkungan, keengganan untuk bersekolah;
   c. Jumlah siswa kota yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi;
   d. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.
   e. Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;
   f. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga
   g. Permasalahan kelompok olah raga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Mutu
   a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
   b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
   c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. Persebaran pendidik belum proporsional;
   e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
   f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
   g. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.
   h. Prestasi olahraga pelajar yang belum maksimal;
   i. Kompetensi pelatih yang masih kurang optimal;
   j. Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga bagi peserta didik, untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif.

3. Tata kelola
    a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
    b. Lemahnya manajemen sekolah;
    c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan.
    d. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah;
    e. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudan

Dari berbagai kendala atau hambatan di atas, jika disikapi dengan bijak justru dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kedepannya.

Adapun tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan dinas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan program wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun pra sekolah, dengan meningkatkan kualitas pendidik, memperluas program afirmasi, memberikan bantuan sosial dan beasiswa guna kualitas pendidikan yang lebih baik;
2. Menekan angka anak putus sekolah atau berhadapan dengan hukum, dengan penguatan pendidikan karakter, sekolah ramah anak, dan peran orang tua dalam mendukung pentingnya pendidikan;
3. Mempertahankan APK dan APM di Kota Yogyakarta, dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di satuan pendidikan khususnya, agar sekolah di Kota Yogyakarta terus diminati;
4. Meningkatkan pemerataan kualitas satuan pendidikan, guna meningkatkan mutu layanan di satuan pendidikan baik di sisi utara, selatan barat dan timur. Agar tidak ada lagi kesenjangan atau ketimpangan antar sisi wilayah di Kota Yogyakarta;
5. Melakukan pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dengan melakukan mutasi, demi perbaikan kualitas pendidikan;
6. Meningkatkan kualitas pendidik dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi;
7. Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk melakukan persamaan pendidikan demi pemenuhan kualifikasinya selinier dengan mata pelajaran yang diampu;
8. Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan baru terkait Tes Kemampuan Akademi (TKA) di satuan pendidikan, dengan menyusun modul soal ujian;
9. Memperkuat kegiatan ekstrakurikuler terkait pendidikan karakter dan pengembangan bahasa jawa dan asing, untuk mewujudkan sekolah unggul;
10. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana olahraga, dan berpeluang untuk melakukan kolaborasi atau bekerjasama dengan lembaga atau dengan pihak swasta dalam pemenuhan sarana dan prasana olahraga;
11. Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga dengan mengoptimalkan para pelatih dengan menyelenggarakan sertifikasi dan pelatihan bagi pelatih secara

berkelanjutan;

12. Melakukan pendampingan terhadap atlit atlit, khususnya atlit berprestasi guna mempersiapkan dalam menghadapi kompetisi baik tingkat kota maupun tingkat propinsi;
13. Melakukan pembinaan prestasi dalam mempersiapkan sistem pencarian bakat yang lebih baik sejak dini;
14. Tantangan dalam pengembangan karakter pemuda, sekaligus peluang untuk memperluas kegiatan kepemudaan berbasis komunitas sekolah dan masyarakat
15. Tantangan dalam pemberdayaan pemuda, sekaligus peluang untuk memperkuat kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan organisasi kepemudaan

1.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta:

1. Akses

i. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan non biaya;

ii. Adanya siswa kota yang sekolah di luar kota;

iii. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK dan APM;

iv. Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;

v. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga

vi. Permasalahan kelompok olah raga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kota Yogyakarta.

2. Mutu

i. Kesenjangan mutu sekolah antar sekolah negeri, antar sekolah swasta, antara sekolah negeri dan swasta.

ii. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;

iii. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;

iv. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;

v. Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga bagi peserta didik, untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif.

3. Tata kelola

i. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;

ii. Lemahnya manajemen sekolah;

iii. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola sekolah;

iv. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah;

v. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan.

Tabel 1.22
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Rata-rata Lama Sekolah	12,12 tahun	IPM	1. Keputusan dari seorang anak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi	1. Faktor ekonomi keluarga 2. Lingkungan sosial dan masyarakat 3. Akes dan fasilitas di satuan pendidikan 4. Pemerataan satuan pendidikan 5. Angka partisipasi sekolah	Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin
Harapan Lama Sekolah	17.66 tahun	IPM	1. Minat dan motivasi dari masyarakat atau siswa 2. Kecerdasan dan bakat yang dimiliki masing masing siswa	1. Faktor ekonomi keluarga 2. Lingkungan sosial dan masyarakat 3. Akes dan fasilitas di satuan pendidikan 4. Pemerataan satuan pendidikan	Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin
Aspek Kajian	**Capaian / Kondisi saat ini**	**Standar yang digunakan**	**Faktor yang mempengaruhi**		**Permasalahan pelayanan OPD**
			Internal	**Eksternal**	
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	75.99	Hasil Rapor Pendidikan, SPM	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Pemenuhan sarpras belum optimal, fasilitasi kompetensi guru belum maksimal
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	62.82	Hasil Rapor Pendidikan, SPM	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Pemenuhan sarpras belum optimal, fasilitasi kompetensi guru belum maksimal
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	84.62	Hasil Rapor Pendidikan, SPM	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Pemenuhan sarpras belum optimal, fasilitasi kompetensi guru belum maksimal
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	73.15	Hasil Rapor Pendidikan, SPM	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Pemenuhan sarpras belum optimal, fasilitasi kompetensi guru belum maksimal

APK SD	110,14%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	1. Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin 2. Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta,
APK SMP	123,16%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	1. Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin 2.Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta,
APM SD	103,95%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	1.Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin 2.Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta,
APM SMP	107,59%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	1.Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin 2.Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta,
APS	100 %	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	1.Pemenuhan fasilitas dan akses serta pemberian bantuan sosial secara merata, bagi keluarga miskin 2.Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta,

Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	99,05%	Data perolehan medali dan kepemudaan yang aktif	Kemampuan dan kemauan dari para pemuda (kualitas SDM)	Paradigma pendidikan keolahragaan dan kepemudaan di masyarakat	1.tersedianya sarana dan prasarana pendukung baik untuk olahraga maupun kegiatan kepemudaan 2.meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang olahraga dan kepemudaan

Isu strategi pendidikan terkait Kesejahteraan tenaga pendidik, Kualitas infrastruktur pendidikan, Pemerataan fasilitas pendidikan, Malnutrisi dan stunting, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

8 Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Isi
    - Peningkatan Pendidikan Karakter
    - Perundungan
    - Tergerusnya budaya lokal
2. Standar Proses
3. Standar Penilaian
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
    - Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial)
    - Kekurangan Tenaga Pendidik termasuk Guru Pendamping Khusus

6. Standar Sarana dan Prasarana
    - Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur dan nyaman
7. Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Standar Pembiayaan
    - Anggaran BOSDA yang belum maksimal
    - Akses Pendidikan untuk masyarakat miskin

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renstra PD perlu penyelarasan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut meliputi penyelarasan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 adalah: "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam penyusunan Renstra mengemban misi sebagai berikut:

1. Misi ke-1 (mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan) yaitu melalui aspek Meningkatkan kualifikasi pendidik, Meningkatkan partisipasi peserta didik, Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga, Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
2. Misi Ke-3 (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan ekonomi yang inklusif kreatif berbasis potensi sumber daya lokal) yaitu melalui aspek peningkatan layanan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin dan peningkatan layanan pendidikan inklusi
3. Misi ke-4 (mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945) yaitu melalui peningkatan kualitas tata kelola kearsipan dan peningkatan capaian pada 8 parameter reformasi birokrasi. Dukungan Dinas Pendidikan Pemudaa dan Olahraga Kota Yogyakarta terhadap program strategis Kepala Daerah terpilih yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui pemberian layanan pendidikan inklusi dan pemberian jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin;
4. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY melalui pendidikan karakter di satuan pendidikan

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya, pendidikan, pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Tujuan dilakukannya penataan ruang yaitu untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan. Kebijakan dan strategi penataan ruang di daerah meliputi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui strategi pengembangan pola ruang yang terdiri dari kawasan peruntukan lindung, kawasan peruntukan budi daya, dan kawasan strategis kota. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas Kawasan Lindung Setempat berupa sempadan sungai ditetapkan seluas kurang lebih 14 hektar, Ruang Terbuka Hijau Privat berupa lahan pekarangan rumah/gedung milik masyarakat/swasta dan atau institusi paling sedikit 10% luas wilayah Daerah, Ruang Terbuka Hijau Publik berupa taman di atap bangunan, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan seluas 626 hektar. Kawasan peruntukan budi daya meliputi kawasan pemukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis kota di Daerah berorientasi pada pembentukan Citra kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

RTRW Kota Yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang Kota Yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik sehingga seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan dalam konteks spasial.

Berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta yang telah disusun sedemikian rupa, maka program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga telah mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dan pemanfaatannya dalam perencanaan strategis. Faktor pendorong ditinjau dari telaah RTRW diatas antara lain adalah dukungan masyarakat terkait ketersediaan satuan pendidikan di wilayah, bentuk bangunan dan keluasan satuan pendidikan berdasarkan RDTR. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya keterbatasan lahan dalam membangun satuan pendidikan baru, keterbatasan SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung lainnya.

2.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jika melihat dari ke tujuh (7) isu pembangunan berkelanjutan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tidak berkaitan secara langsung, namun jika melihat salah satu dari ke tujuh isu pembangunan berkelanjutan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ikut merasakan imbasnya, seperti pada isu pengelolaan persampahan yang belum optimal dan kerentanan dan kesenjangan sosial ekonomi. Dimana dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab bersama dalam penanganan permasalahan pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan dalam

penanganan dan pengelolaan sampah, menjadi salah satu Quick win Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung program Wali kota terpilih, yaitu program GRESEK (Gerakan Reresik Sekolah) yang dilaksanakan setiap Jumat Wage. Untuk kerentanan dan kesenjangan sosial ekonomi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki program dan kegiatan terkait pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat miskin yang terdata dalam KSJPS khususnya penduduk Kota Yogyakarta melalui Unit Pelayanan Terpadu Jaminan Pendidikan Daerah, dan pemberian layanan bagi masyarakat afirmasi atau Disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas.

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, memiliki potensi besar dalam menghasilkan SDM yang unggul. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas SDM berjalan merata dan optimal. Isu strategis dalam peningkatan kualitas SDM ini mencakup dua permasalahan utama:

Belum meratanya kualitas pendidikan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi dibandingkan daerah lain, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Kesenjangan ini terlihat dalam aspek fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap pendidikan berbasis teknologi. Selain itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Biaya pendidikan yang cenderung semakin tinggi serta kurangnya dukungan fasilitas inklusif juga menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi di masa mendatang. Selain itu, keluaran pendidikan juga masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, terutama dalam bidang teknologi informasi dan ekonomi kreatif agar lulusan lebih siap menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Ditinjau dari permasalahan, faktor pendorong, faktor penghambat, dan isu-isu yang ada di masyarakat perlu dirumuskan isu strategis yang diangkat dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah. Isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta setelah dilakukan beberapa telaah dan analisa pada sub bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya kesenjangan akses pendidikan khususnya pendidikan inklusif;
b. Masih kurangnya pemerataan kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan negeri;
c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal;
d. Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai;
e. Terbatasnya pendidik atau guru pendamping khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara sekolah inklusi;

f. Belum optimalnya fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi;

g. Pemenuhan pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas;

h. Masih terbatasnya ketersediaan pelatih yang bersertifikasi;

i. Masih terbatasnya sarana prasana olahraga, seperti GOR, Lapangan;

j. Kurangnya kemauan dan keinginan bagi pemuda dalam mengikuti kegiatan kepemudaan

k. Tingkat keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan masih cukup rendah

Tabel 1.23 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-karakteristik masyarakat yang cenderung progresif dan jaringan komunitas yang aktif;	Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan non biaya dan Anak Berhadapan dengan Hukum ;	pengelolaan persampahan yang belum optimal;	komitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs)	tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan	- Masih adanya kesenjangan akses pendidikan khususnya pendidikan inklusif - Masih kurangnya pemerataan kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan negeri - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pusat pendidikan dan budaya nasional	Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	perubahan iklim global	ketimpangan akses terhadap pendidikan,	penanganan masalah sampah	Pemenuhan pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas
tingginya tingkat kesadaran masyarakat, komunitas lingkungan yang aktif, serta dorongan inovasi sektor swasta;	Minimnya Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi sekolah inklusi		Pendidikan lingkungan, dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai program edukasi	etahanan sosial ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana	penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia	- Terbatasnya pendidik atau guru pendamping khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara sekolah inklusi - Belum optimalnya fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi
	Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;			peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional	penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;	Masih terbatasnya sarana prasana olahraga, seperti GOR, Lapangan
	Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga;				peningkatan kualitas layanan publik untuk mewujudkan Good Government	Masih terbatasnya ketersediaan pelatih yang bersertifikasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya minat pemuda dalam berwirausaha atau menjadi calon wirausaha				Governance	a. Kurangnya kemauan dan keinginan bagi pemuda dalam mengikuti kegiatan kepemudaan b. Tingkat keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan masih cukup rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Tujuan pembangunan daerah mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

Startegi dan kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaran pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, pemuda yang handal serta tata kelola yang akuntabel.

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 perlu disusun dalam beberapa pentahapan sebagai kerangka waktu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Setiap tahapan menggambarkan langkah-langkah strategis perangkat daerah dalam memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan.

Selaras dengan RPJMD Kota Yogyakarta, tahapan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terbagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu:

Tahun pertama (2026): penyiapan kebijakan dan penguatan sumber daya, yaitu dengan penyusunan program kegiatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penguatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, dan

sumber daya sarana prasarana secara efektif dan efisien;

Tahun kedua (2027): peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat, serta melakukan berbagai inovasi layanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan layanan yang disediakan secara murah,mudah dan cepat;

Tahun ketiga (2028): akselerasi target pembangunan, yaitu dengan melakukan evaluasi sekaligus mengkaji pencapaian target pembangunan hingga pertengahan periode Renstra dengan kesesuaian arah kebijakan pembangunan yang diambil agar tetap di jalur yang telah direncanakan sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai;

Tahun keempat (2029): pembangunan yang berkelanjutan, yaitu tahapan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dari tahun pertama hingga ketiga telah sesuai Renstra, dapat mencapai target akhir periode Renstra, pelaksanaan program kegiatan terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang luas dan merata, serta dapat dilaksanakan lagi secara berkelanjutan;

Tahun kelima (2030): penyelesaian dan kesinambungan pembangunan, yaitu tahap dimana program kegiatan tercapai sesuai target tahunannya sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah, untuk kemudian melangkah ke periode Renstra berikutnya dalam pencapaian pembangunan jangka panjang daerah.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam Renstra 2025- 2029 sebagaimana ditampilkan pada berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.01.2.19.2.22.01.0000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga											
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD (Skor)	75,99	75.01-76.00	75.05-76.50	75.09-77.00	75.14-77.50	75.18-78.00	75,22 - 78.50	
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD (Skor)	62,82	61.00-62.85	61.05-63.00	61.10-63.50	61.15-64.00	61.20-64.50	61,25 - 65.00	
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP (Skor)	84,62	83.05-85.00	83.10-85.50	83.15-86.00	83.20-86.50	83.25-87.00	83,25 - 87.00	
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP (Skor)	73,15	72.00-73.20	72.05-73.70	72.15-74.70	72.20-75.20	72.20-75.20	72,25 - 75.70	
			persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi (Medali)	58.29	58.34	58.34	59.92	59.92	61.50	61.50	
			Indeks pembangunan pemuda (Indeks)	73,83	73,84	73,85	73,86	73,87	73,88	73,89	
		Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi (Persentase)	85,78	90,09	90,99	91,89	92,79	93,69	94,59	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (Persentase)	94,22	95,05	95,95	96,85	97,75	98,65	100	
		Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	90,86	90,88	90,9	90,92	90,94	90,97	90,99	

			Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi (%)	99,34	98,34	99,34	99,34	99,78	99,78	99,78	
		Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan (Indeks)	7	12	15	18	21	24	27	
		Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persentase)	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	
		Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat (poin)	90-34	82-85	83-86	84-87	85-88	86-90	90-93	

Sumber data: SIPD cascading dan data kinerja Dindikpora

Tabel 3.4. Tahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan Kebijakan dan Penguatan Sumber Daya	Peningkatan Akses dan Kualitas pendidikan dan Layanan Publik	Akselerasi Target Pembangunan	Pembangunan yang Berkelanjutan	Penyelesaian dan Kesinambungan Pembangunan

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari aspek strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas- prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuandan sasaran Renstra PD.

Berikut penjabaran arah kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal. • Penyelenggaraan lomba olahraga dan kegiatan kepemudaan yang mengacu pada	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, melalui: a. Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan b. Meningkatkan partisipasi dan prestasi peserta didik c. Meningkatkan kualitas bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi d. Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) e. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana g. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK 2. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan, melalui: a. Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas,	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan: a. Meningkatkan kualifikasi pendidik minimal sesuai jenjang pendidikan tempat mereka mengajar, yaitu minimal D-IV/S1 untuk pendidik PAUD, SD, dan SMP, dan sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku b. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan prestasi peserta didik dalam semua jenik kompetisi yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah c. Meningkatkan kualitas jaminan pendidikan di semua jenjang bagi warga kota yang terdata dalam KSJPS, dan memberikan bantuan	

		berdaya saing dan berkarakter b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga c. Memperkuat ekosistem dan industri olahraga 3. Peningkatan prestasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, melalui: a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan -	beasiswa bagi warga kota usia sekolah yang mendapatkan nilai ASPD terbaik tingkat kelurahan d. Meningkatkan kualitas sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pendidikan berkualitas dan berkeadilan e. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dalam menghadapi kurikulum 13 tahun, dan 1 tahun pra sekolah dasar f. Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi, kualitas berbahasa asing, dan pengembangan layanan pendidikan berbasis digitalisasi 2. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan a. Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas dengan melakukan pembinaan terhadap atlet berprestasi b. Meningkatkan kualitas /pembangunan sarana dan prasana oalhraga sesuai dengan standar c. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kinerja organisasi olahraga 3. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi	

			kepemudaan a. Meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda dalam pengembangan kapasita kepemudaan b. meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025- 2029 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.2.19.2.22.01.0000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga							
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat - Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan kesehatragaan.				Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD		
					Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD		
					Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		
					Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		
					persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi		
					Indeks pembangunan pemuda		
		Meningkatnya mutu pendidikan			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca		
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD		Angka Partisipasi Kasar SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP		Angka Partisipasi Kasar SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD		Angka Partisipasi Murni SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP		Angka Partisipasi Murni SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD	Meningkatnya kualitas pembelajaran SD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.3.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya Kualitas Pembayaran Jaminan Pendidikan di jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP	Meningkatnya kualitas pembiayaan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Meningkatnya kualitas pembelajaran SMP	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya iklim inklusivitas dan kesetaraan SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya Kualitas Pemberiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Indeks pemerataan guru		meningkatnya pemerataan guru di sekolah negeri	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik		Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Indeks pemerataan guru	Meningkatnya pemerataan guru di sekolah negeri	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Indeks pemerataan guru	Meningkatnya pemerataan guru di sekolah negeri	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 - Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan			Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
					Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
					Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
					Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi		
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD		Angka Partisipasi Kasar SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP		Angka Partisipasi Kasar SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik nonformal/kesetaraan		Persentase Kelulusan peserta didik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD		Angka Partisipasi Murni SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP		Angka Partisipasi Murni SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SD	Meningkatnya kualitas pembelajaran SD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0046 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyelasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP	Meningkatnya kualitas pembelajaran	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Meningkatnya kualitas pembelajaran SMP	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya partisipasi peserta didik nonformal/keasetaraan	Meningkatnya kualitas pembelajaran PAUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan TK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang TK	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
						1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pengelolaan data dan pemantauan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di PKBM	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Indeks pemerataan guru		meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik		Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Indeks pemerataan guru	Meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Indeks pemerataan guru	Meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualifikasi pendidik	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 - Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan			Jumlah Cabang Olahraga Unggulan		
			Meningkatnya prestasi keolahragaan		persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Meningkatnya kualitas pembinaan atlet	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di lingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di lingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingan kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya Kapasitas Atlet	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase pengelolaan organisasi kesatrahgaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi kesatrahgaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Kesatrahgaan di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesatrahgaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesatrahgaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Peningkatan kualitas/pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan Standar	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0010 - Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif		
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pengembangan kapasitas kepemudaan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang hakinya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang hakinya terpenuhi	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dindikpora		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Nilai SPIP Dindikpora	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dindikpora	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindikpora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.01.01.2.02.0003 - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekapitulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03.0006 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Disdikpora	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.01.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
101- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				415.385.547.892,00		417.728.535.832,00		420.118.383.528,00		422.556.028.184,00		425.042.425.728,00		
10101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				247.911.494.484,00		247.916.536.038,00		247.921.678.421,00		247.926.923.656,00		247.932.273.792,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dindikpora	Nilai IKM Dindikpora	81,91	82,17	247.911.494.484,00	82,30	247.916.536.038,00	82,43	247.921.678.421,00	82,56	247.926.923.656,00	82,69	247.932.273.792,00	1012.19.2.22.010000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan	
	Nilai SPIP Dindikpora	4,605	4,510		4,515		4,520		4,525		4,530			
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	A	A		A		A		A		A			
101012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.899.700,00		96.797.694,00		98.733.647,00		100.708.320,00		102.722.486,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindikpora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	94.899.700,00	3	96.797.694,00	3	98.733.647,00	3	100.708.320,00	3	102.722.486,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2				2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2		2		2		2		2			
101012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.459.100,00		6.588.282,00		6.720.048,00		6.854.449,00		6.991.538,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	6.459.100,00	4	6.588.282,00	4	6.720.048,00	4	6.854.449,00	4	6.991.538,00		
101012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.862.800,00		7.000.056,00		7.140.057,00		7.282.858,00		7.428.515,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	6.862.800,00		7.000.056,00	2	7.140.057,00	2	7.282.858,00	2	7.428.515,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
101012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.055.900,00		8.217.018,00		8.381358,00		8.548.986,00		8.719.965,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	8.055.900,00	2	8.217.018,00	2	8.381358,00	2	8.548.986,00	2	8.719.965,00		
101012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.866.100,00		7.003.422,00		7.143.490,00		7.286.360,00		7.432.087,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	6.866.100,00	2	7.003.422,00	2	7.143.490,00	2	7.286.360,00	2	7.432.087,00		
101012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				9.386.100,00		9.573.822,00		9.765.298,00		9.960.604,00		10.159.816,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	9.386.100,00	2	9.573.822,00	2	9.765.298,00	2	9.960.604,00	2	10.159.816,00		
101012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				54.844.700,00		55.941594,00		57.060.426,00		58.201634,00		59.365.667,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	54.844.700,00	2	55.941594,00	2	57.060.426,00	2	58.201634,00	2	59.365.667,00		
101012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.425.000,00		2.473.500,00		2.522.970,00		2.573.429,00		2.624.898,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	2.425.000,00	3	2.473.500,00	3	2.522.970,00	3	2.573.429,00	3	2.624.898,00		
101012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				237.325.367.857,00		237.328.511417,00		237.331717.847,00		237.334.988.409,00		237.338.324.379,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	237.325.367.857,00	4	237.328.511417,00	4	237.331717.847,00	4	237.334.988.409,00	4	237.338.324.379,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2230	2230		2230		2230		2230		2230			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				237.168.189.857,00		237.168.189.857,00		237.168.189.857,00		237.168.189.857,00		237.168.189.857,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2230	2230	237.168.189.857,00	2230	237.168.189.857,00	2230	237.168.189.857,00	2230	237.168.189.857,00	2230	237.168.189.857,00		
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.727.000,00		11.961.540,00		12.200.771,00		12.444.786,00		12.693.682,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	8	11.727.000,00	8	11.961.540,00	8	12.200.771,00	8	12.444.786,00	8	12.693.682,00		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.640.000,00		2.692.800,00		2.746.656,00		2.801.589,00		2.857.621,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	8	2.640.000,00	8	2.692.800,00	8	2.746.656,00	8	2.801.589,00	8	2.857.621,00		
1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.476.000,00		3.545.520,00		3.616.430,00		3.688.759,00		3.762.534,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	6	3.476.000,00	6	3.545.520,00	6	3.616.430,00	6	3.688.759,00	6	3.762.534,00		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.738.000,00		1.772.760,00		1.808.215,00		1.844.380,00		1.881.267,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	1.738.000,00	2	1.772.760,00	2	1.808.215,00	2	1.844.380,00	2	1.881.267,00		
1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.738.000,00		1.772.760,00		1.808.215,00		1.844.380,00		1.881.267,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	1.738.000,00	2	1.772.760,00	2	1.808.215,00	2	1.844.380,00	2	1.881.267,00		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				135.133.000,00		137.835.660,00		140.592.373,00		143.404.221,00		146.272.305,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	135.133.000,00	4	137.835.660,00	4	140.592.373,00	4	143.404.221,00	4	146.272.305,00		
1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				726.000,00		740.520,00		755.330,00		770.437,00		785.846,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	726.000,00	2	740.520,00	2	755.330,00	2	770.437,00	2	785.846,00		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	9.900.000,00	1	9.900.000,00	1	9.900.000,00	1	9.900.000,00	1	9.900.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
101012.03.0001- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dindikpora	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		1650.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00	1	1650.000,00		
101012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				644.415.010,00		644.415.010,00		644.415.010,00		644.415.010,00		644.415.010,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	40	644.415.010,00	40	644.415.010,00	40	644.415.010,00	40	644.415.010,00	40	644.415.010,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	13		13		13		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	76		76		76		76		76			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20		20		20		20		20			
101012.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				77.695.700,00		77.695.700,00		77.695.700,00		77.695.700,00		77.695.700,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	77.695.700,00	20	77.695.700,00	20	77.695.700,00	20	77.695.700,00	20	77.695.700,00		
101012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				143.015.010,00		143.015.010,00		143.015.010,00		143.015.010,00		143.015.010,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	143.015.010,00	4	143.015.010,00	4	143.015.010,00	4	143.015.010,00	4	143.015.010,00		
101012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.748.000,00		39.748.000,00		39.748.000,00		39.748.000,00		39.748.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	39.748.000,00	4	39.748.000,00	4	39.748.000,00	4	39.748.000,00	4	39.748.000,00		
101012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				49.756.300,00		49.756.300,00		49.756.300,00		49.756.300,00		49.756.300,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	13	49.756.300,00	13	49.756.300,00	13	49.756.300,00	13	49.756.300,00	13	49.756.300,00		
101012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	40	19.600.000,00	40	19.600.000,00	40	19.600.000,00	40	19.600.000,00	40	19.600.000,00		
101012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	76	314.600.000,00	76	314.600.000,00	76	314.600.000,00	76	314.600.000,00	76	314.600.000,00		
101012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00		
101012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		127.987.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00	64	127.987.500,00		
101012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.567.620.000,00		3.567.620.000,00		3.567.620.000,00		3.567.620.000,00		3.567.620.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.567.620.000,00	1	3.567.620.000,00	1	3.567.620.000,00	1	3.567.620.000,00	1	3.567.620.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
101012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				179.820.000,00		179.820.000,00		179.820.000,00		179.820.000,00		179.820.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	179.820.000,00	1	179.820.000,00	1	179.820.000,00	1	179.820.000,00	1	179.820.000,00		
101012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.800.000,00		13.800.000,00		13.800.000,00		13.800.000,00		13.800.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	13.800.000,00	1	13.800.000,00	1	13.800.000,00	1	13.800.000,00	1	13.800.000,00		
101012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.374.000.000,00		3.374.000.000,00		3.374.000.000,00		3.374.000.000,00		3.374.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	3.374.000.000,00	1	3.374.000.000,00	1	3.374.000.000,00	1	3.374.000.000,00	1	3.374.000.000,00		
101012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.139.654.417,00		6.139.654.417,00		6.139.654.417,00		6.139.654.417,00		6.139.654.417,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	296	296	6.139.654.417,00	296	6.139.654.417,00	296	6.139.654.417,00	296	6.139.654.417,00	296	6.139.654.417,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	81		81		81		81		81			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1		1		1		1		1			
101012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				48.465.000,00		48.465.000,00		48.465.000,00		48.465.000,00		48.465.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	48.465.000,00	1	48.465.000,00	1	48.465.000,00	1	48.465.000,00	1	48.465.000,00		
101012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				479.304.850,00		479.304.850,00		479.304.850,00		479.304.850,00		479.304.850,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	81	479.304.850,00	81	479.304.850,00	81	479.304.850,00	81	479.304.850,00	81	479.304.850,00		
101012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				267.550.000,00		267.550.000,00		267.550.000,00		267.550.000,00		267.550.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	296	296	267.550.000,00	296	267.550.000,00	296	267.550.000,00	296	267.550.000,00	296	267.550.000,00		
101012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.344.334.567,00		5.344.334.567,00		5.344.334.567,00		5.344.334.567,00		5.344.334.567,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5.344.334.567,00	5	5.344.334.567,00	5	5.344.334.567,00	5	5.344.334.567,00	5	5.344.334.567,00		
10102 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				148.984.528.408,00		150.952.684.294,00		152.960.203.297,00		155.007.872.682,00		157.096.495.453,00		
Meningkatnya partisipasi peserta didik nonformal/kesetaraan	Persentase Kelulusan peserta didik	52	52.1	22.091075.800,00	52.15	22.510.408.516,00	52.2	22.938.127.885,00	52.25	23.374.401644,00	52.30	23.819.400.877,00	1012.19.2.22.010 000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
10102.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.901089.800,00		17.222.682.796,00		17.550.707.651,00		17.885.293.005,00		18.226.570.065,00		
Meningkatnya kualitas pembelajaran PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	106	80	7.154.408.800,00	80	7.297.496.976,00	80	7.443.446.915,00	80	7.592.315.854,00	80	7.744.162.171,00		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	118	50		50		50		50		50			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	494	494		494		494		494		494			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	92	80		80		80		80		80			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	676	614		614		614		614		614			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	691	494		494		494		494		494			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10	229		229		229		229		229			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	1		1		1		1		1			
10102.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				2.308.800.000,00		2.354.976.000,00		2.402.075.520,00		2.450.117.030,00		2.499.119.371,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	676	614	2.308.800.000,00	614	2.354.976.000,00	614	2.402.075.520,00	614	2.450.117.030,00	614	2.499.119.371,00		
10102.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				56.708.000,00		57.842.160,00		58.999.003,00		60.178.983,00		61.382.563,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	106	80	56.708.000,00	80	57.842.160,00	80	58.999.003,00	80	60.178.983,00	80	61.382.563,00		
10102.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				4.429.373.000,00		4.517.960.460,00		4.608.319.669,00		4.700.486.063,00		4.794.495.784,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	691	494	4.429.373.000,00	494	4.517.960.460,00	494	4.608.319.669,00	494	4.700.486.063,00	494	4.794.495.784,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10102.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				51.979.800,00		53.019.396,00		54.079.784,00		55.161380,00		56.264.607,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	118	50	51.979.800,00	50	53.019.396,00	50	54.079.784,00	50	55.161380,00	50	56.264.607,00		
10102.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				81000.000,00		82.620.000,00		84.272.400,00		85.957.848,00		87.677.005,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	1	81000.000,00	1	82.620.000,00	1	84.272.400,00	1	85.957.848,00	1	87.677.005,00		
10102.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				34.380.000,00		35.067.600,00		35.768.952,00		36.484.331,00		37.214.018,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10	229	34.380.000,00	229	35.067.600,00	229	35.768.952,00	229	36.484.331,00	229	37.214.018,00		
10102.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				45.072.000,00		45.973.440,00		46.892.909,00		47.830.767,00		48.787.382,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	92	80	45.072.000,00	80	45.973.440,00	80	46.892.909,00	80	47.830.767,00	80	48.787.382,00		
10102.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				147.096.000,00		150.037.920,00		153.038.678,00		156.099.452,00		159.221441,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	494	494	147.096.000,00	494	150.037.920,00	494	153.038.678,00	494	156.099.452,00	494	159.221441,00		
Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang TK	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691	396	9.335.360.000,00	398	9.505.647.200,00	398	9.679.340.144,00	398	9.856.506.947,00	398	10.037.217.086,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	821	821		821		821		821		821			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2025	1250		1250		1250		1250		1250			
10102.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				542.000.000,00		552.840.000,00		563.896.800,00		575.174.736,00		586.678.231,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2025	1250	542.000.000,00	1250	552.840.000,00	1250	563.896.800,00	1250	575.174.736,00	1250	586.678.231,00		
10102.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				7.972.360.000,00		8.131807.200,00		8.294.443.344,00		8.460.332.211,00		8.629.538.855,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691	396	7.972.360.000,00	398	8.131807.200,00	398	8.294.443.344,00	398	8.460.332.211,00	398	8.629.538.855,00		
10102.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				821000.000,00		821000.000,00		821000.000,00		821000.000,00		821000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	821	821	821000.000,00	821	821000.000,00	821	821000.000,00	821	821000.000,00	821	821000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan TK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0	3	411.321000,00	3	419.538.620,00	3	427.920.592,00	3	436.470.204,00	3	445.190.808,00		
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0	138		138		138		138		138			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10102.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				177.981000,00		181540.620,00		185.171432,00		188.874.861,00		192.652.358,00		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0	138	177.981000,00	138	181540.620,00	138	185.171432,00	138	188.874.861,00	138	192.652.358,00		
10102.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				232.900.000,00		237.558.000,00		242.309.160,00		247.155.343,00		252.098.450,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1	232.900.000,00		237.558.000,00	1	242.309.160,00	1	247.155.343,00	1	252.098.450,00		
10102.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0	3	440.000,00	3	440.000,00	3	440.000,00	3	440.000,00	3	440.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi				-		-		-		-		-		
10102.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.189.986.000,00		5.287.725.720,00		5.387.420.234,00		5.489.108.639,00		5.592.830.812,00		
Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di PKBM	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18	18	4.389.745.000,00	18	4.477.539.900,00	18	4.567.090.698,00	18	4.658.432.512,00	18	4.751601.162,00		
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	419	484		484		484		484		484			
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	251	5		5		5		5		5			
10102.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				893.750.000,00		911625.000,00		929.857.500,00		948.454.650,00		967.423.743,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	419	484	893.750.000,00	484	911625.000,00	484	929.857.500,00	484	948.454.650,00	484	967.423.743,00		
10102.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				2.414.495.000,00		2.462.784.900,00		2.512.040.598,00		2.562.281410,00		2.613.527.038,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18	18	2.414.495.000,00	18	2.462.784.900,00	18	2.512.040.598,00	18	2.562.281410,00	18	2.613.527.038,00		
10102.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1081500.000,00		1.103.130.000,00		1.125.192.600,00		1.147.696.452,00		1.170.650.381,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	251	5	1081500.000,00	5	1.103.130.000,00	5	1.125.192.600,00	5	1.147.696.452,00	5	1.170.650.381,00		
Meningkatnya pengelolaan data dan pemantauan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1512	2500	800.241000,00	2500	810.185.820,00	2500	820.329.536,00	2500	830.676.127,00	2500	841229.650,00		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	80		80		80		80		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25	70		70		70		70		70			
10102.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				231.000.000,00		231.000.000,00		231.000.000,00		231.000.000,00		231.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25	70	231.000.000,00	70	231.000.000,00	70	231.000.000,00	70	231.000.000,00	70	231.000.000,00		
10102.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	60	72.000.000,00	60	72.000.000,00	60	72.000.000,00	60	72.000.000,00	60	72.000.000,00		
10102.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				37.920.000,00		38.678.400,00		39.451968,00		40.241007,00		41045.828,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	80	37.920.000,00	80	38.678.400,00	80	39.451968,00	80	40.241007,00	80	41045.828,00		
10102.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				459.321000,00		468.507.420,00		477.877.568,00		487.435.120,00		497.183.822,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1512	2500	459.321000,00	2500	468.507.420,00	2500	477.877.568,00	2500	487.435.120,00	2500	497.183.822,00		
Meningkatnya partisipasi peserta didik SD	Angka Partisipasi Murni SD	103.95	100	82.079.832.700,00	100	82.975.382.072,00	100	83.888.842.431,00	100	84.820.571997,00	100	85.770.936.155,00		
	Angka Partisipasi Kasar SD	110.14	110.135		110.137		110.138		110.137		110.138			
10102.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				82.079.832.700,00		82.975.382.072,00		83.888.842.431,00		84.820.571997,00		85.770.936.155,00		
Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	1300	1.047.631800,00	1300	1.068.584.436,00	1300	1.089.956.125,00	1300	1.111.755.247,00	1300	1.133.990.352,00		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	3		4		4		4		4			
10102.2.010025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				792.453.000,00		808.302.060,00		824.468.101,00		840.957.463,00		857.776.612,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	1300	792.453.000,00	1300	808.302.060,00	1300	824.468.101,00	1300	840.957.463,00	1300	857.776.612,00		
10102.2.010039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				255.178.800,00		260.282.376,00		265.488.024,00		270.797.784,00		276.213.740,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	3	255.178.800,00	4	260.282.376,00	4	265.488.024,00	4	270.797.784,00	4	276.213.740,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	165	162	129.184.000,00	162	131.767.680,00	162	134.403.034,00	162	137.091.094,00	162	139.832.916,00		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4	2		2		2		2		2			
10102.2.010028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100.284.000,00		102.289.680,00		104.335.474,00		106.422.183,00		108.550.627,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	165	162	100.284.000,00	162	102.289.680,00	162	104.335.474,00	162	106.422.183,00	162	108.550.627,00		
10102.2.010043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				28.900.000,00		29.478.000,00		30.067.560,00		30.668.911,00		31.282.289,00		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4	2	28.900.000,00	2	29.478.000,00	2	30.067.560,00	2	30.668.911,00	2	31.282.289,00		
Meningkatnya kualitas pembelajaran SD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21	166	2.571.727.100,00	166	2.623.161.642,00	166	2.675.624.874,00	166	2.729.137.372,00	166	2.783.720.119,00		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166	166		166		166				166			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1				1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6	5		7		7		8		8			
10102.2.010036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				1.137.198.000,00		1.159.941.960,00		1.183.140.799,00		1.206.803.615,00		1.230.939.687,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6	5	1.137.198.000,00	7	1.159.941.960,00	7	1.183.140.799,00	8	1.206.803.615,00	8	1.230.939.687,00		
10102.2.010038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				58.290.000,00		59.455.800,00		60.644.916,00		61.857.814,00		63.094.971,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	58.290.000,00		59.455.800,00	1	60.644.916,00	1	61.857.814,00	1	63.094.971,00		
10102.2.010041- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				27.176.000,00		27.719.520,00		28.273.910,00		28.839.389,00		29.416.176,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21	166	27.176.000,00	166	27.719.520,00	166	28.273.910,00	166	28.839.389,00	166	29.416.176,00		
10102.2.010050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				1.349.063.100,00		1.376.044.362,00		1.403.565.249,00		1.431.636.554,00		1.460.269.285,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166	166	1.349.063.100,00	166	1.376.044.362,00	166	1.403.565.249,00		1.431.636.554,00	166	1.460.269.285,00		
Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5554	4675	66.790.144.100,00	4725	67.379.899.700,00	4800	67.981.450.412,00	4850	68.595.032.139,00	4925	69.220.885.499,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	165	162		162		162				162			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32516	30436		30440		30500		30500		30500			
10102.2.010029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				37.302.364.100,00		37.302.364.100,00		37.302.364.100,00		37.302.364.100,00		37.302.364.100,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	165	162	37.302.364.100,00	162	37.302.364.100,00	162	37.302.364.100,00		37.302.364.100,00	162	37.302.364.100,00		
10102.2.010030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				25.871.440.000,00		26.388.868.800,00		26.916.646.176,00		27.454.979.100,00		28.004.078.682,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32516	30436	25.871.440.000,00	30440	26.388.868.800,00	30500	26.916.646.176,00	30500	27.454.979.100,00	30500	28.004.078.682,00		
10102.2.010054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				3.616.340.000,00		3.688.666.800,00		3.762.440.136,00		3.837.688.939,00		3.914.442.717,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5554	4675	3.616.340.000,00	4725	3.688.666.800,00	4800	3.762.440.136,00	4850	3.837.688.939,00	4925	3.914.442.717,00		
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	13	5.804.559.700,00	13	5.920.650.894,00	13	6.039.063.912,00	13	6.159.845.189,00	13	6.283.042.094,00		
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	660	278		278		278		278		278			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	13	40		40		40		40		40			
10102.2.010014 - Pengadaan Mebel Sekolah				482.939.800,00		492.598.596,00		502.450.568,00		512.499.579,00		522.749.571,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	660	278	482.939.800,00	278	492.598.596,00	278	502.450.568,00	278	512.499.579,00	278	522.749.571,00		
10102.2.010048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.880.050.000,00		4.977.651.000,00		5.077.204.020,00		5.178.748.100,00		5.282.323.062,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	13	4.880.050.000,00	13	4.977.651.000,00	13	5.077.204.020,00	13	5.178.748.100,00	13	5.282.323.062,00		
10102.2.010055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				441.569.900,00		450.401.298,00		459.409.324,00		468.597.510,00		477.969.461,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	13	40	441.569.900,00	40	450.401.298,00	40	459.409.324,00	40	468.597.510,00	40	477.969.461,00		
Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	85	200	5.736.586.000,00	200	5.851.317.720,00	200	5.968.344.074,00	200	6.087.710.956,00	200	6.209.465.175,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	185	185		185		185		185		185			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	143	130		130		130		130		130			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10102.2.010026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				5.579.836.000,00		5.691432.720,00		5.805.261374,00		5.921366.602,00		6.039.793.934,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	185	185	5.579.836.000,00	185	5.691432.720,00	185	5.805.261374,00	185	5.921366.602,00	185	6.039.793.934,00		
10102.2.010027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				51320.000,00		52.346.400,00		53.393.328,00		54.461195,00		55.550.418,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	85	200	51320.000,00	200	52.346.400,00	200	53.393.328,00	200	54.461195,00	200	55.550.418,00		
10102.2.010049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				105.430.000,00		107.538.600,00		109.689.372,00		111883.159,00		114.120.823,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	143	130	105.430.000,00	130	107.538.600,00	130	109.689.372,00	130	111883.159,00	130	114.120.823,00		
Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP	Angka Partisipasi Murni SMP	107.59	100	44.813.619.908,00	100	45.466.893.706,00	100	46.133.232.981,00	100	46.812.899.041,00	100	47.506.158.421,00		
	Angka Partisipasi Kasar SMP	123.16	124.92		125.79		126.68		127.57		128.47			
10102.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				44.813.619.908,00		45.466.893.706,00		46.133.232.981,00		46.812.899.041,00		47.506.158.421,00		
Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	6	1213.548.500,00	6	1237.819.470,00	6	1262.575.860,00	6	1287.827.377,00	6	1313.583.924,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	750		750		750		750		750			
10102.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				946.644.500,00		965.577.390,00		984.888.938,00		1004.586.717,00		1024.678.451,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	750	946.644.500,00	750	965.577.390,00	750	984.888.938,00	750	1004.586.717,00	750	1024.678.451,00		
10102.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				266.904.000,00		272.242.080,00		277.686.922,00		283.240.660,00		288.905.473,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	6	266.904.000,00	6	272.242.080,00	6	277.686.922,00	6	283.240.660,00	6	288.905.473,00		
Meningkatnya iklim keamanan dan kenyamanan SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4	2	26.960.000,00	2	27.499.200,00	2	28.049.184,00	2	28.610.168,00		29.182.371,00		
10102.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				26.960.000,00		27.499.200,00		28.049.184,00		28.610.168,00		29.182.371,00		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4	2	26.960.000,00	2	27.499.200,00	2	28.049.184,00	2	28.610.168,00		29.182.371,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	58	58	144.314.900,00	58	147.201.198,00	58	150.145.222,00	58	153.148.126,00	58	156.211.089,00		
10102.2.02.0041- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				144.314.900,00		147.201.198,00		150.145.222,00		153.148.126,00		156.211.089,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	58	58	144.314.900,00	58	147.201.198,00	58	150.145.222,00	58	153.148.126,00	58	156.211.089,00		
Meningkatnya kualitas pembelajaran SMP	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20	66	19.288.441.300,00	66	19.674.210.126,00	66	20.067.694.328,00	66	20.469.048.216,00	66	20.878.429.180,00		
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	65	65		65		65		65		65			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3905	5247		5247		5247		5247		5247			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375	300		300		300		300		300			
10102.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				18.521.945.000,00		18.892.383.900,00		19.270.231.578,00		19.655.636.210,00		20.048.748.934,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3905	5247	18.521.945.000,00	5247	18.892.383.900,00	5247	19.270.231.578,00	5247	19.655.636.210,00	5247	20.048.748.934,00		
10102.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				146.130.300,00		149.052.906,00		152.033.964,00		155.074.643,00		158.176.136,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375	300	146.130.300,00	300	149.052.906,00	300	152.033.964,00	300	155.074.643,00	300	158.176.136,00		
10102.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				203.070.000,00		207.131.400,00		211.274.028,00		215.499.509,00		219.809.499,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20	66	203.070.000,00	66	207.131.400,00	66	211.274.028,00	66	215.499.509,00	66	219.809.499,00		
10102.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				417.296.000,00		425.641.920,00		434.154.758,00		442.837.854,00		451.694.611,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	65	65	417.296.000,00	65	425.641.920,00	65	434.154.758,00	65	442.837.854,00	65	451.694.611,00		
Meningkatnya kualitas pembiayaan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41	42	16.061.180.000,00	42	16.139.405.000,00	42	16.219.194.500,00	42	16.300.579.790,00	42	16.383.592.786,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4415	4958		4958		4958		4958		4958			
10102.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				12.149.930.000,00		12.149.930.000,00		12.149.930.000,00		12.149.930.000,00		12.149.930.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41	42	12.149.930.000,00	42	12.149.930.000,00	42	12.149.930.000,00	42	12.149.930.000,00	42	12.149.930.000,00		
10102.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				3.911.250.000,00		3.989.475.000,00		4.069.264.500,00		4.150.649.790,00		4.233.662.786,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4415	4958	3.911.250.000,00	4958	3.989.475.000,00	4958	4.069.264.500,00	4958	4.150.649.790,00	4958	4.233.662.786,00		
Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6237	5600	5.705.500.000,00		5.819.610.000,00		5.936.002.200,00		6.054.722.244,00		6.175.816.689,00		
10102.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				5.705.500.000,00		5.819.610.000,00		5.936.002.200,00		6.054.722.244,00		6.175.816.689,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6237	5600	5.705.500.000,00		5.819.610.000,00		5.936.002.200,00		6.054.722.244,00		6.175.816.689,00		
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0	30	2.373.675.208,00	30	2.421.148.712,00	30	2.469.571.687,00	30	2.518.963.120,00	30	2.569.342.382,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	39		39		39		39		39			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	578	278		278		278		278		278			
10102.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				914.403.237,00		932.691.302,00		951.345.128,00		970.372.030,00		989.779.471,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	914.403.237,00	3	932.691.302,00	3	951.345.128,00	3	970.372.030,00	3	989.779.471,00		
10102.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				319.729.211,00		326.123.795,00		332.646.271,00		339.299.197,00		346.085.180,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	578	278	319.729.211,00	278	326.123.795,00	278	332.646.271,00	278	339.299.197,00	278	346.085.180,00		
10102.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				320.192.000,00		326.595.840,00		333.127.757,00		339.790.312,00		346.586.118,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	39	320.192.000,00	39	326.595.840,00	39	333.127.757,00	39	339.790.312,00	39	346.586.118,00		
10102.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				819.350.760,00		835.737.775,00		852.452.531,00		869.501.581,00		886.891.613,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0	30	819.350.760,00	30	835.737.775,00	30	852.452.531,00	30	869.501.581,00	30	886.891.613,00		
Meningkatnya Kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi				-		-		-		-		-		
10104 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				18.489.525.000,00		18.859.315.500,00		19.236.501.810,00		19.621.231.846,00		20.013.656.483,00		
Indeks pemerataan guru	meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri	98.05	98.54	53.925.000,00	98.78	55.003.500,00	99.02	56.103.570,00	99.26	57.225.641,00	99.50	58.370.154,00	1012.19.2.22.010 000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10104.2.01- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				18.489.525.000,00		18.859.315.500,00		19.236.501.810,00		19.621.231.846,00		20.013.656.483,00		
Meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	1	53.925.000,00	1	55.003.500,00	1	56.103.570,00	1	57.225.641,00	1	58.370.154,00		
10104.2.010001- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				53.925.000,00		55.003.500,00		56.103.570,00		57.225.641,00		58.370.154,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	1	53.925.000,00	1	55.003.500,00	1	56.103.570,00	1	57.225.641,00	1	58.370.154,00		
Meningkatnya kualifikasi pendidik	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	95.24	97.20	18.435.600.000,00	97.26	18.804.312.000,00	97.32	19.180.398.240,00	97.37	19.564.006.205,00	97.43	19.955.286.329,00		
10104.2.01- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				18.489.525.000,00		18.859.315.500,00		19.236.501.810,00		19.621.231.846,00		20.013.656.483,00		
Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	12	18.435.600.000,00	12	18.804.312.000,00	12	19.180.398.240,00	12	19.564.006.205,00	12	19.955.286.329,00		
10104.2.010002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				18.435.600.000,00		18.804.312.000,00		19.180.398.240,00		19.564.006.205,00		19.955.286.329,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	12	18.435.600.000,00	12	18.804.312.000,00	12	19.180.398.240,00	12	19.564.006.205,00	12	19.955.286.329,00		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				21.745.546.378,00		21.956.857.306,00		22.172.394.453,00		22.392.242.342,00		22.616.487.187,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.006.898.750,00		2.047.036.725,00		2.087.977.460,00		2.129.737.009,00		2.172.331.748,00		
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan	5.04	5.06	2.006.898.750,00	5.07	2.047.036.725,00	9.68	2.087.977.460,00	5.09	2.129.737.009,00	5.10	2.172.331.748,00	1012.19.2.22.01.0000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.02.2.01- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.799.258.750,00		1.835.243.925,00		1.871.948.804,00		1.909.387.780,00		1.947.575.534,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pengembangan kapasitas kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100	1195	1.799.258.750,00	1195	1.835.243.925,00	1195	1.871.948.804,00	1195	1.909.387.780,00	1195	1.947.575.534,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40	4391		4391		4391		4391		4391			
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	45815	10537		10537		10537		10537		10537			
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100	3		3		3		3		3			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.010010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				70.617.500,00		72.029.850,00		73.470.447,00		74.939.856,00		76.438.653,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	70.617.500,00	1	72.029.850,00	1	73.470.447,00	1	74.939.856,00	1	76.438.653,00		
2.19.02.2.010011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				591.048.750,00		602.869.725,00		614.927.120,00		627.225.662,00		639.770.175,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100	1195	591.048.750,00	1195	602.869.725,00	1195	614.927.120,00	1195	627.225.662,00	1195	639.770.175,00		
2.19.02.2.010013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				638.280.000,00		651.045.600,00		664.066.512,00		677.347.842,00		690.894.799,00		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100	3	638.280.000,00	3	651.045.600,00	3	664.066.512,00	3	677.347.842,00	3	690.894.799,00		
2.19.02.2.010014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				397.370.000,00		405.317.400,00		413.423.748,00		421.692.223,00		430.126.067,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	45815	10537	397.370.000,00	10537	405.317.400,00	10537	413.423.748,00	10537	421.692.223,00	10537	430.126.067,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.010015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				101.942.500,00		103.981.350,00		106.060.977,00		108.182.197,00		110.345.840,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40	4391	101.942.500,00	4391	103.981.350,00	4391	106.060.977,00	4391	108.182.197,00	4391	110.345.840,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				207.640.000,00		211.792.800,00		216.028.656,00		220.349.229,00		224.756.214,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	3	207.640.000,00	4	211.792.800,00	4	216.028.656,00	4	220.349.229,00	4	224.756.214,00		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				207.640.000,00		211.792.800,00		216.028.656,00		220.349.229,00		224.756.214,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	3	207.640.000,00	4	211.792.800,00	4	216.028.656,00	4	220.349.229,00	4	224.756.214,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				19.738.647.628,00		19.909.820.581,00		20.084.416.993,00		20.262.505.333,00		20.444.155.439,00		
Meningkatnya prestasi keolahragaan	persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi	217	219	19.738.647.628,00	220	19.909.820.581,00	221	20.084.416.993,00	222	20.262.505.333,00	224	20.444.155.439,00	1.01.2.19.2.22.010000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan	
2.19.03.2.01- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pembinaan atlet	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	12	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00		
2.19.03.2.010005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	12	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				999.190.000,00		1.019.173.800,00		1.039.557.276,00		1.060.348.422,00		1.081.555.390,00		
Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	2	999.190.000,00	2	1.019.173.800,00	2	1.039.557.276,00	2	1.060.348.422,00	2	1.081.555.390,00		
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	300	300		300		300		300		300			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				613.572.000,00		625.843.440,00		638.360.309,00		651.127.515,00		664.150.065,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	2	613.572.000,00	2	625.843.440,00	2	638.360.309,00	2	651.127.515,00	2	664.150.065,00		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				385.618.000,00		393.330.360,00		401.196.967,00		409.220.907,00		417.405.325,00		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	300	300	385.618.000,00	300	393.330.360,00	300	401.196.967,00	300	409.220.907,00	300	417.405.325,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				3.531655.400,00		3.602.288.508,00		3.674.334.279,00		3.747.820.964,00		3.822.777.383,00		
Meningkatnya Kapasitas Atlet	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	266	204	3.531655.400,00	204	3.602.288.508,00	204	3.674.334.279,00	204	3.747.820.964,00	204	3.822.777.383,00		
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300	790		790		790		790		790			
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				1223.494.000,00		1247.963.880,00		1272.923.158,00		1298.381621,00		1324.349.253,00		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300	790	1223.494.000,00	790	1247.963.880,00	790	1272.923.158,00	790	1298.381621,00	790	1324.349.253,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				2.101541400,00		2.143.572.228,00		2.186.443.673,00		2.230.172.546,00		2.274.775.997,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	266	204	2.101541400,00	204	2.143.572.228,00	204	2.186.443.673,00	204	2.230.172.546,00	204	2.274.775.997,00		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				206.620.000,00		210.752.400,00		214.967.448,00		219.266.797,00		223.652.133,00		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	1	206.620.000,00	1	210.752.400,00	1	214.967.448,00	1	219.266.797,00	1	223.652.133,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				10.511000.000,00		10.511220.000,00		10.511444.400,00		10.511673.288,00		10.511906.754,00		
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	1	10.511000.000,00	1	10.511220.000,00	1	10.511444.400,00	1	10.511673.288,00	1	10.511906.754,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2			
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				11.000.000,00		11.220.000,00		11.444.400,00		11.673.288,00		11.906.754,00		
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	1	11.000.000,00	1	11.220.000,00	1	11.444.400,00	1	11.673.288,00	1	11.906.754,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	10.500.000.000,00	2	10.500.000.000,00	2	10.500.000.000,00	2	10.500.000.000,00	2	10.500.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				4.216.802.228,00		4.297.138.273,00		4.379.081.038,00		4.462.662.659,00		4.547.915.912,00		
Terlaksananya Peningkatan kualitas/pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan Standar	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	9	4.216.802.228,00	9	4.297.138.273,00	9	4.379.081.038,00	9	4.462.662.659,00	9	4.547.915.912,00		
	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				331.283.000,00		337.908.660,00		344.666.833,00		351.560.170,00		358.591.373,00		
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	11	331.283.000,00	11	337.908.660,00	11	344.666.833,00	11	351.560.170,00	11	358.591.373,00		
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				3.010.079.228,00		3.070.280.813,00		3.131.686.429,00		3.194.320.157,00		3.258.206.561,00		
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	9	3.010.079.228,00	9	3.070.280.813,00	9	3.131.686.429,00	9	3.194.320.157,00	9	3.258.206.561,00		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				675.440.000,00		688.948.800,00		702.727.776,00		716.782.332,00		731.117.978,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	675.440.000,00	1	688.948.800,00	1	702.727.776,00	1	716.782.332,00	1	731.117.978,00		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.01.2.19.2.22.01.0000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1	10102 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana • Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Meningkatnya partisipasi peserta didik SD	10102.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				10102.2.010039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				10102.2.010043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				10102.2.010054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP	10102.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				10102.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
				10102.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				10102.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				10102.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
2.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	• Penumbuhan Wirausaha Muda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.19.02.2.01- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				2.19.02.2.010011- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
3.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Ekonomi Olahraga	Meningkatnya prestasi keolahragaan	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, maupun unit kerja lainnya. Berikut ini adalah IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sesuai Rensta 2025-2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	1012.19.2.22.010000 - Dinas Pendidikan Pemuda dan									
2.	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Skor	75,99	75.01-76.00	75.05-76.50	75.09-77.00	75.14-77.50	75.18-78.00	75,22 - 78.50	
3.	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Skor	62,82	61,00-62.85	61,05-63.00	61,10-63.50	61,15-64.00	61,20-64.50	61,25 - 65.00	
4.	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	Skor	84,62	83,00 - 84.65	83,05 - 85.00	83,10 - 85.50	83,15 - 86.00	83,20 - 86.50	83,25 - 87.00	
5.	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	Skor	73,15	72,00 - 73.20	72,05 - 73.70	72,10 - 74.20	72,15 - 74.70	72,20 - 75.20	72,25 - 75.70	
6.	persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Medali	0	58.34	58.34	59.92	59.92	61,50	61,50	
7.	Indeks pembangunan pemuda	Indeks	73,83	73,84	73,85	73,86	73,87	73,88	73,89	
8.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	Persentase	85,78	90,09	90,99	91,89	92,79	93,69	94,59	
9.	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	Indeks	7	12	15	18	21	24	27	
10.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase	94,22	95,05	95,95	96,85	97,75	98,65	100	
11.	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	90,86	90,88	90,9	90,92	90,94	90,97	90,99	
12.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	
13.	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi	%	99,34	98,34	99,34	99,34	99,78	99,78	99,78	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan tertentu. IKK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk urusan pendidikan dan urusan pemuda dan olahraga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	positif	%	90,86	90,88	90,9	90,92	90,94	90,97	90,99	
3.	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	komulatif	Persentase	90,86	90,88	90,9	90,92	90,94	90,97	90,99	
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
10.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	Persentase	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	
11.	persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi		Medali	217	218	219	220	221	222	224	
12.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan	positif	Persentase	5,04	5,05	5,06	5,07	9,68	5,09	5,1	

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kerangka pendanaan, serta indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Namun demikian target, rencana kerja, dan pagu indikatif tahun 2030 juga disusun karena program kerja tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Selain itu Renstra disusun dengan memperhatikan responsif gender sehingga diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan kesempatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan, memenuhi kebutuhan informasi, hingga menikmati manfaat dari layanan yang diberikan. Melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dapat tercapai, dan dapat memberikan kontribusi dampak manfaat yang nyata bagi Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

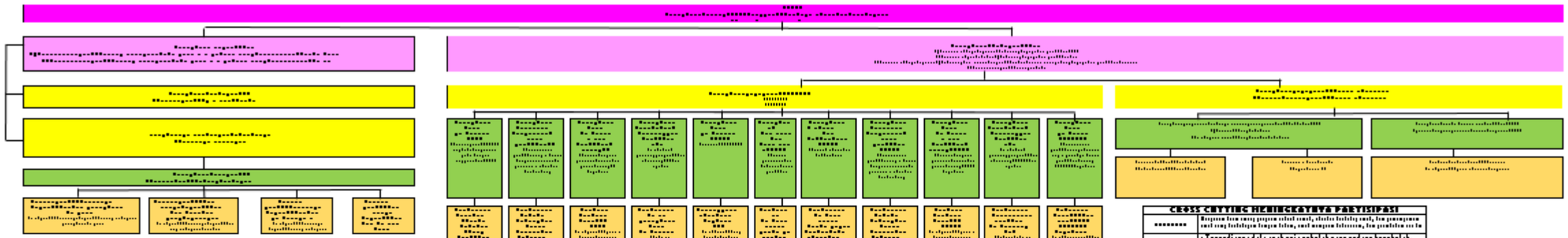

HIRGKATHYA KUALIFIKASI PENDIDIK DAN HERINGKATHYA PENGUNAAN CUER	
BKPSDM	Berperan dalam sinergi perencanaan pegawai termasuk tenaga pendidikan di sekolah, fasilitasi kesiswa, ijin belajar, tugas belajar, pelatihan bagi pegawai tenaga pendidikan, dan pelatihan untuk calon kepala sekolah.
BPDGP	- BPDGP mengkoordinasikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme para pendidik - BPDGP mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan komunitas belajar guru sebagai rhizoform yang kolaboratif untuk peningkatan kompetensi
BPPMP	BPPMP memberikan pelatihan dan fasilitasi untuk mengembangkan kapasitas SDM di Diodik, pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mengimplementasikan program dan kebijakan pendidikan

CROSS CUTTING HERINGKATHYA PARTISIPASI PESERTA DIDIK SD,	
BPMP	
DINDIKPORA	Berkoordinasi dengan dinas dinas pendidikan kabupaten/kota di DIY untuk mengelaksanakan perencanaan dan mengkoordinasikan program-program pemilmu, seperti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB)
BPKAD	aset daerah yang digunakan oleh DIKPORA, seperti gedung sekolah, fasilitas olahraga, dan peralatan pendidikan lainnya, termasuk mengelola standar harga dan kebutuhan barang
DPUPKP	Berperan dalam mewujudkan peningkatan prasarana di sekolah seperti pembangunan ruang belajar baru, rehabilitasi berat dan lainnya.
DINSOSNAKER	mengelola pendudk kota yang masuk dalam data KSPS untuk sasaran jaminan pendidikan daerah dan melakukan sinilasi bagi calon penerima bantuan
DINDUKCAPIL	Terverifikasi data jumlah penduduk Kota Yogyakarta masuk sistem database kependudukan, baik secara konvensional atau berdasarkan nisn sekolah
KEJAKSAAN	Kejaksaan aktif mengkoordinasikan program JMS untuk memberikan pemahaman hukum dan mencegah budaya hukum rajah dini kepada siswa, guru, dan mengawal di lingkungan sekolah, sehingga tercipta suasana aman dan kondusif dalam lingkungan sekolah.

CROSS CUTTING HERINGKATHYA PARTISIPASI	
********	Program lain yang secara relevan untuk anak, seperti kesehatan anak, tata ruang kota yang mempertimbangkan keluarga, dan pemerintah secara
**********	- Terverifikasi data anak usia sekolah yang sedang bersekolah, tidak bersekolah, anak berkebutuhan dengan hukum - Terlaksananya pemantauan dan pendampingan Anak Tidak Sekolah bersama Tim Jam Belajar Masyarakat (JBM)

TUJUAN
Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.
IK1: Perrentase perolehan medali
IK2: Indeks pembangunan pemuda

Meningkatnya keparitar daya saing keolahragaan
IK: Jumlah Cabang Olahraga Unggulan

Meningkatnya prestari keolahragaan
IK: perrentare Perolehan Medali Tingkat Provinsi

Meningkatnya Keparitar Atlet
IK: Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan

Meningkatnya kualitar pembinaan atlet
IK: Perrentare jumlah ziruta hasil pembinaan yang berprestari

Terlaksananya Peningkatan kualitas/pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan Standar
IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya

terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota
IK: jumlah kejuaraan olahraga tingkat darah kab/kota yang diselenggarakan oleh dindikpara

terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
IK: jumlah organisasi olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh dindikpara

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan siswa Berprestasi kabupaten/kota
IK: Jumlah siswa Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Dikirikan Pengembangan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan siswa Berprestasi kabupaten/kota
IK: Jumlah siswa Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Dikirikan Pengembangan

Terpenuhinya sarana prasarana olahraga di satuan pendidikan
IK: jumlah sarana prasarana olahraga di satuan pendidikan

Terlaksananya kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota
IK: jumlah kejuaraan olahraga tingkat darah kab/kota

terlaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi lembaga
IK: jumlah organisasi olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh dindikpara

CROSS CUTTING MENINGKATNYA DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

LEMBAGA KONI	bertuanang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinarikan seluruh kegiatan olahraga prestari khususnya di Kota Yogyakarta
LEMBAGA INPCI	bertanggung jawab untuk membina, melatih, dan mengkoordinarikan kegiatan olahraga prestari bagi penyandang disabilitar di Indonesia untuk tingkat nasional maupun internasional
BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY	menyelenggarakan dan membina kegiatan olahraga, baik olahraga prestari maupun olahraga rekreasi, serta memfasilitasi berbagai jenis kegiatan olahraga di masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan
IK: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
IK: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pengembangan keparitar kepemudaan
IK: Perrentase pemuda yang meningkat kapasitarnya

meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota
IK: perrentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

Terlaksananya pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepelopornan pemuda
IK: Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan

Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
IK: jumlah organisasi pekemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan

CROSS CUTTING MENINGKATNYA KUALITAS SDM KEPEMUDAAN

DisperindagUKM	Berperan dalam kegiatan layanan kepemudaan (kewirausahaan muda)
ekonomi kreatif	bekerjasama dalam mengembangkan wirausaha muda dan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah
badan kesbangpol	Berperan dalam kegiatan berkaitan dengan kepemudaan,

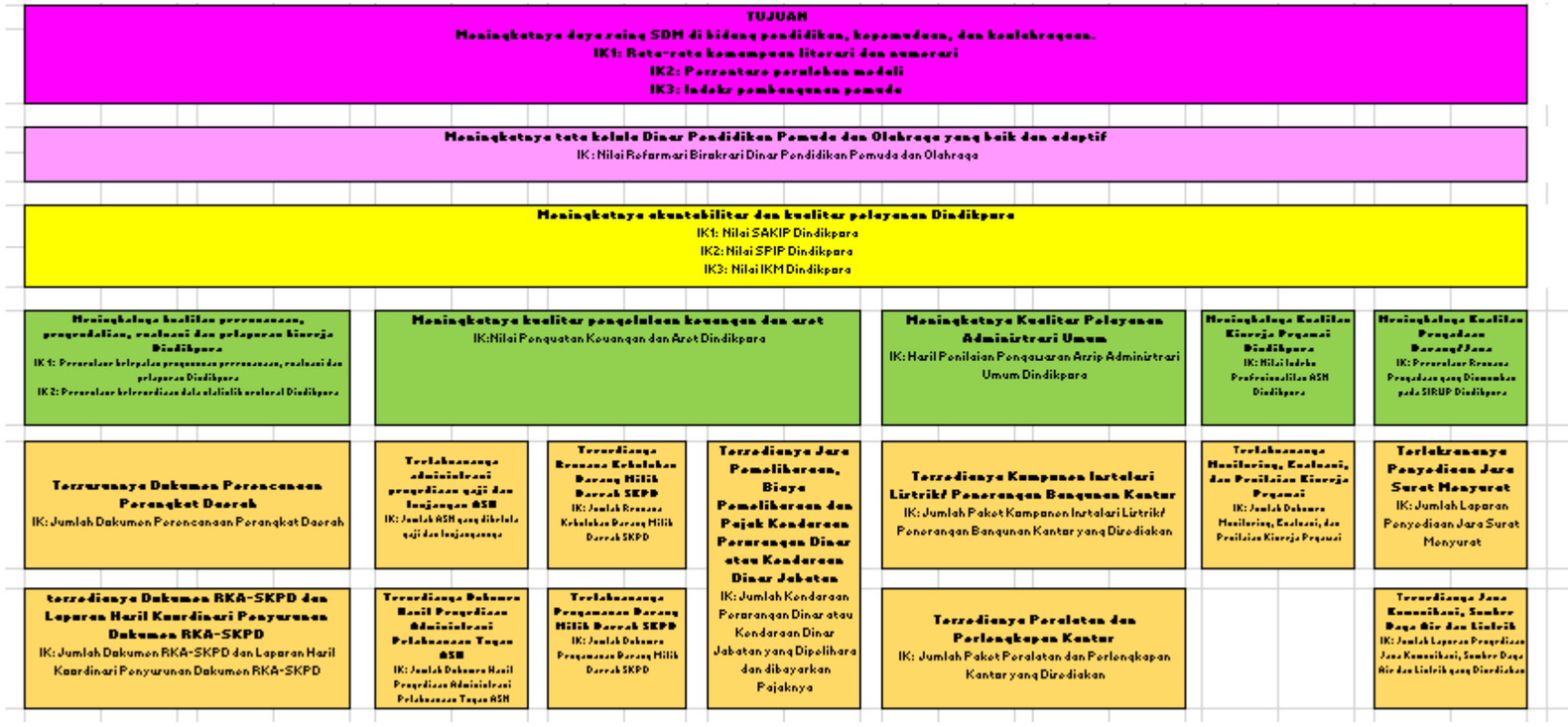
TUJUAN
Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.
IK1: Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi
IK2: Persentase penduduk melek
IK3: Indeks pembangunan pemuda
Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif
IK : Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dindikpora
IK1: Nilai SAKIP Dindikpora
IK2: Nilai SPIP Dindikpora
IK3: Nilai IKM Dindikpora
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindikpora
IK 1: Persentase keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora
IK 2: Persentase keterserapan dalam akuntabilitas anggaran Dindikpora
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset
IK:Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum
IK: Hasil Penilaian Pengaduan Arsip Administrasi Umum Dindikpora
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dindikpora
IK: Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
IK: Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya administrasi pengadaan gaji dan tunjangan ASN
IK: Jumlah ASN yang dibiaya gaji dan tunjangannya
Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD
IK: Jumlah Barang Milik Daerah SKPD
Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Terpenuhinya Kampanan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
IK: Jumlah Paket Kampanan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
IK: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
terpenuhinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Terwujudnya Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IK: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK: Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

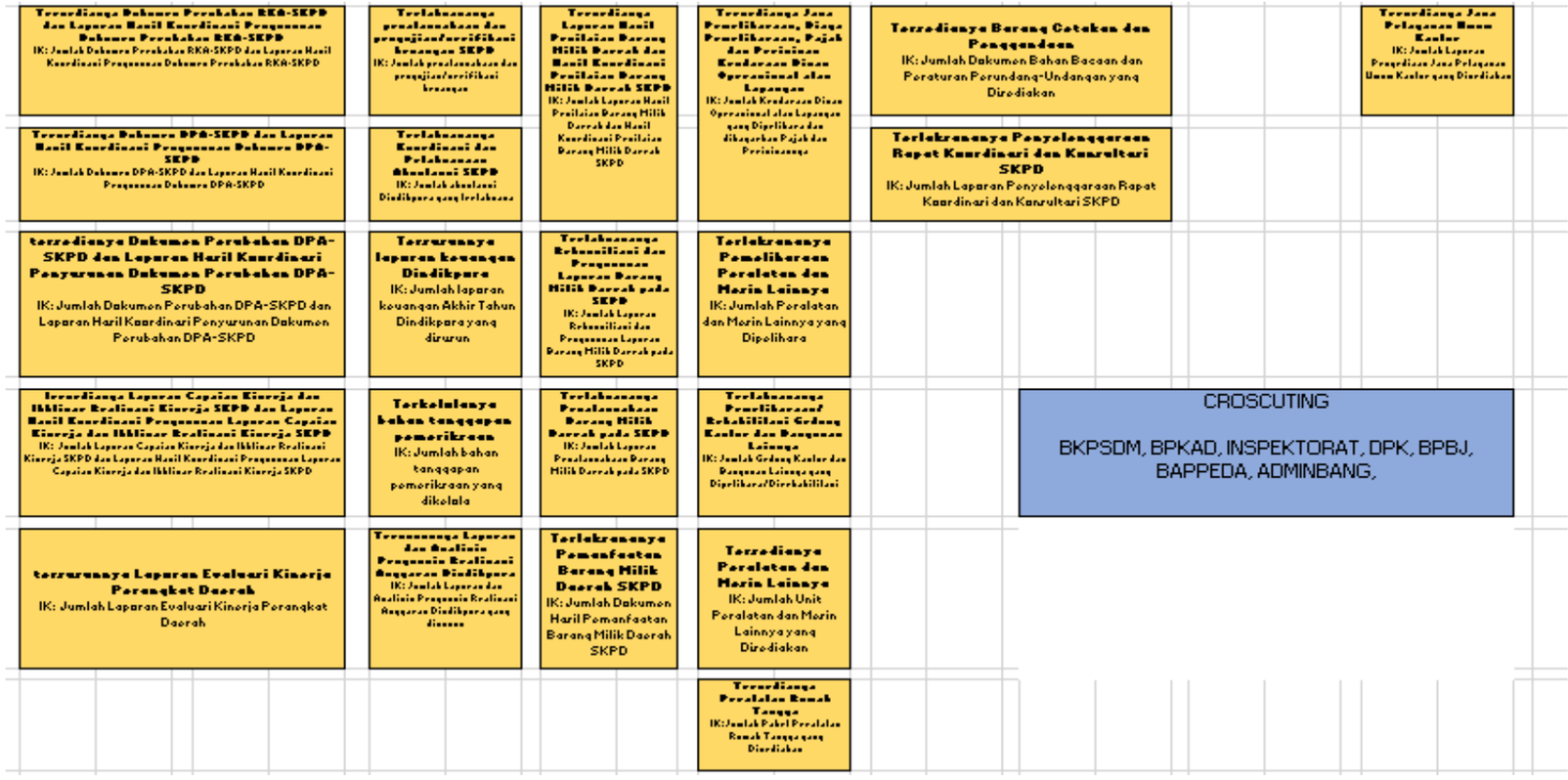
Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Terlaksananya pengadaan dan pengujian/sertifikasi kendaraan SKPD
IK: Jumlah pengadaan dan pengujian/sertifikasi kendaraan
Terwujudnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
IK: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dikuarkan Pajak dan Perizinannya
Terrsedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
IK: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diredakan
Terwujudnya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK: Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diardakan
Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK: Jumlah akuntansi Dindikpora yang terlaksana
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK: Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinari dan Konsultari SKPD
IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinari dan Konsultari SKPD
terredianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Haril Koordinari Penyurunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Haril Koordinari Penyurunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Terrurunnya laporan keuangan Dindikpora
IK: Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Dindikpora yang dirurun
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terkelolanya bahan tanggapan pemerikraan
IK: Jumlah bahan tanggapan pemerikraan yang dikelola
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
CROSCUTING
BKPSDM, BPKAD, INSPEKTORAT, DPK, BPBJ, BAPPEDA, ADMINBANG,
terrurunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terrurunnya Laporan dan Analisis Penguasia Realisasi Anggaran Dindikpora
IK: Jumlah Laporan dan Analisis Penguasia Realisasi Anggaran Dindikpora yang diusun
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK: Jumlah Dokumen Haril Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Terredianya Peralatan dan Mesin Lainnya
IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diredakan
Terredianya Peralatan Rumah Tangga
IK: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diardakan

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta sebagai program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, selalu mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Kota Yogyakarta. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan kota yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta, dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengikuti mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan lima tahunan berdasar dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Penyusunan Rencana Strategis merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta pada lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala,

drg. Emma Rahmi Aryani, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606091993032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.3.1. Maksud 8
1.3.2. Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN 11
2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi 11
2.1.1. Dinas Kesehatan 11
2.1.2. RSUD Kota Yogyakarta 20
2.1.3. Rumah Sakit Pratama 22
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 23
2.2.1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan 23
2.2.2. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Yogyakarta 26
2.2.3. Sarana dan Prasarana RSUD Kota Yogyakarta 30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 31
2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 74
2.4 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 75
2.4.1.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinkes 81
2.4.1.2. Analisis Keselarasan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan 82
2.4.1.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis 84
2.4.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta 85
2.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 88
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 91
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 91
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 96
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 101
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 101
4.2 Program Prioritas Kesehatan 196
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 198
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan 200
BAB V PENUTUP 203

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai menurut pangkat Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 23
Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 24
Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 24
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun 2025 29
Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 31
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 31
Tabel 2. 7 Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 36
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Sasaran dan Program RSUD Kota Yogyakarta 49
Tabel 2. 9 Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 52
Tabel 2. 10 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 54
Tabel 2. 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 61
Tabel 2. 12 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024 65
Tabel 2. 13 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Tahun 2020 - 2024 66
Tabel 2. 14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan 72
Tabel 2. 15 Teknis Penyimpulan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 76
Tabel 2. 16 Keselarasan Indikator RIBK dengan Indikator Renstra Dinas Kesehatan 2025-2020 82
Tabel 2. 17 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta 86
Tabel 2. 18 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 89
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd 94
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 96
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 98
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) 2025-2029 102
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RSUD Kota Yogyakarta) 2025-2029 137
Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Rumah Sakit Pratama) 2025-2029 145
Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan 149
Tabel 4. 5 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Rsud Kota Yogyakarta 177
Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 191
Tabel 4. 7 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 196
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 199

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Bidang Kesehatan 201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 20
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta..... 21
Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 22
Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020 s/d 2024 32
Gambar 2. 5 Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024..... 33
Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2020 - 2024..... 34
Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020 s/d 2024..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat . Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan, menurut **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi

non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan dan merata, diperlukan perencanaan strategis yang adaptif terhadap dinamika perubahan kebijakan, tantangan global, serta kebutuhan masyarakat. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan di daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

1. **Arah Kebijakan Nasional dan Daerah**
   Renstra ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi ini diperlukan agar program dan kegiatan Dinas Kesehatan turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. **Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
   Undang-undang ini membawa perubahan paradigma dalam sistem kesehatan nasional, menekankan pada integrasi layanan, penguatan sistem kesehatan, serta pendekatan promotif dan preventif. Renstra Dinas Kesehatan perlu mengakomodasi amanat UU tersebut dalam perencanaan strategis.
3. **Evaluasi Capaian Renstra Sebelumnya**
   Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan ke depan. Capaian, hambatan, dan pelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya dianalisis untuk memperkuat strategi baru.
4. **Tantangan dan Isu Strategis Kesehatan**
   Permasalahan seperti stunting, penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan dasar, ketimpangan akses layanan, serta dampak perubahan iklim terhadap kesehatan menjadi isu utama yang harus dijawab dalam dokumen Renstra.
5. **Penguatan Sistem Kesehatan Daerah**
   Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan, sistem informasi kesehatan, ketersediaan dan pemerataan sarana-prasarana, serta pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan menjadi bagian dari kerangka penguatan sistem kesehatan daerah.

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan jangka panjang, dan strategi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, perencanaan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program yang terukur dan berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki peran untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang kesehatan masyarakat yang

menyediakan sarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang pemeriksaan, serta pelayanan penunjang lainnya. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). RPJP Nasional 2025-2045 sebagai perencanaan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, serta dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu: (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam; (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resources. Agenda dari SDGs tersebut di atas adalah untuk mencapai 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran Tahun 2O3O yaitu untuk mewujudkan masyarakat global dan nasional salah satunya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan Rencana Kinerja/ Renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas *(Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan juga memuat dokumen perencanaan RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta.

Arah Pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Visi Misi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Tahun 2025-2029 tercantum dalam :

1. 8 Misi Asta Cita ke -4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan cara Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
2. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win ke-2 yaitu: Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan angka TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap.

3. 17 Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 ke-7 yaitu Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.

Pembangunan Kesehatan di Kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta, termasuk rumah sakit, puskesmas, serta program kesehatan masyarakat. Selain itu, juga bertugas untuk mengelola program imunisasi, gizi, pengendalian penyakit, dan promosi kesehatan di tingkat kota. Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sangat vital dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan fokus pada program-program preventif dan promotif serta peningkatan pelayanan kesehatan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra tersebut juga bersinergi dengan RPJMN dan Renstra Dinas Kesehatan DIY. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta kemudian dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga merefleksikan rencana program yang ada di dalam renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY agar tetap sinergis dalam penyusunan perencanaan kegiatan tiap tahunnya.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang dijelaskan diatas, maka perlu penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 tertuang dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan;
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
39. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
40. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek kesehatan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, termasuk di dalamnya RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan maksud menyediakan acuan kerja penyelenggaraan program dan kegiatan, serta bertujuan untuk:

1. Menetapkan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 5 tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama dalam penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.
7. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan menetapkan strategi untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada.
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan melalui indikator-indikator yang jelas dan terukur serta menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
9. Menjadi alat evaluasi kinerja untuk melihat capaian dan perbaikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Uraian program;

4.2 Uraian kegiatan;

4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta serta mendasar pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimana disebutkan Visi Kota Yogyakarta yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".** Adapun 5 misi Kota Yogyakarta yaitu**:**

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan;
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
      1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
      2. Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
   d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
      1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat.

e. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri atas:
   1. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi;
   2. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
   1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer;
   2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris.

a. Tugas
   1. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
b. Fungsi
   1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
   2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
   3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
   4. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja pada bidang, dan seksi;
   5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
   6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
   7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
   8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
   9. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
   10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
   11. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kesehatan.

b. Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya kesehatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
5. penelitian dan pengembangan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
6. bimbingan administrasi, bimbingan teknis, visitasi/ asesmen sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
7. pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
8. pelayanan non perizinan sarana kesehatan, sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, dan tanda daftar bagi penyehat tradisional;
9. pembinaan dan pengawasan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
10. monitoring dan evaluasi pengelolaan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
11. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman;
12. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
13. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;

14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat.

b. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kesehatan masyarakat;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
5. penelitian dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
6. pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
7. fasilitasi dan koordinasi kesekretariatan penyelenggaraan Kota Sehat;
8. monitoring dan evaluasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan masyarakat;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
11. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
13. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

D. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan, pengendalian penyakit, dan pengelolaan data dan sistem informasi.

b. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, pengendalian penyakit, dan pengelolaan data dan sistem informasi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit menular, dan imunisasi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
6. penelitian dan pengembangan surveilans kesehatan, epidemiologi, serta pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
7. pengelolaan surveilans kesehatan dan penyelidikan epidemiologi;
8. pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
9. penyusunan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
10. kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa/ wabah;
11. komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, dan/ atau Kejadian Luar Biasa/ wabah;
12. bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
13. monitoring dan evaluasi surveilans kesehatan serta pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
15. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;

16. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
17. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

E. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

c. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional komplementer;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan;
7. pengelolaan jaminan kesehatan;
8. penilaian dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
9. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan;
10. pembinaan, pendampingan, dan pengendalian penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan;
11. bimbingan teknis dan supervisi pelayanan jaminan kesehatan;
12. monitoring dan evaluasi pelayanan jaminan kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
14. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

16. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

F. Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat

Berdasar pada Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari:

1). **UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**

a. Fungsi :

UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan.

b. Tugas :

1. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
3. pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan medis di lokasi kejadian di Daerah;
4. pelaksanaan stabilisasi pasien sebelum dan pada saat dilakukan evakuasi medik;
5. pelaksanaan evakuasi medik pasien gawat darurat dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan;
6. penggantian biaya penanganan kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan jejaring sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas;
7. pelaksanaan koordinasi penanganan kegawatdaruratan medis antar institusi yang terkait;
8. pelaksanaan edukasi dan informasi pertolongan pertama pada kegawatdaruratan;
9. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
11. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
12. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;

14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

2). **UPT Laboratorium Kesehatan**

a. Fungsi :

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan

b. Tugas :

1. Menyusun perencanaan kegiatan UPT;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
3. Mengelola dan pelayanan laboratorium kesehatan;
4. Pengujian parameter kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kualitas makanan, dan surveilans;
5. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium kesehatan sesuai dokumen mutu laboratorium;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT; g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
7. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
9. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

3). **UPT Puskesmas**

a. Fungsi

Pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

b. Tugas

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan puskesmas;
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
4. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan;

6. Melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional.
7. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
8. Melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
10. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga upt;
11. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja upt;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang terdiri dari:

(1) Puskesmas Danurejan I
(2) Puskesmas Danurejan II
(3) Puskesmas Gedongtengen
(4) Puskesmas Gondomanan
(5) Puskesmas Gondokusuman I
(6) Puskesmas Gondokusuman II
(7) Puskesmas Jetis
(8) Puskesmas Kotagede I
(9) Puskesmas Kotagede II
(10) Puskesmas Kraton
(11) Puskesmas Mantrijeron
(12) Puskesmas Mergangsan
(13) Puskesmas Ngampilan
(14) Puskesmas Pakualaman
(15) Puskesmas Tegalrejo
(16) Puskesmas Umbulharjo I
(17) Puskesmas Umbulharjo II
(18) Puskesmas Wirobrajan

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Sumber : Perwal No 37 tahun 2023

2.1.2. RSUD Kota Yogyakarta

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas, terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Untuk selanjutnya tugas pokok, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

Selain Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta juga dirumuskan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Tugas pokok dan Fungsi sesuai Perwal Nomor 39 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Tugas

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna:.

b) Fungsi

RSUD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas RSUD.

c) Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

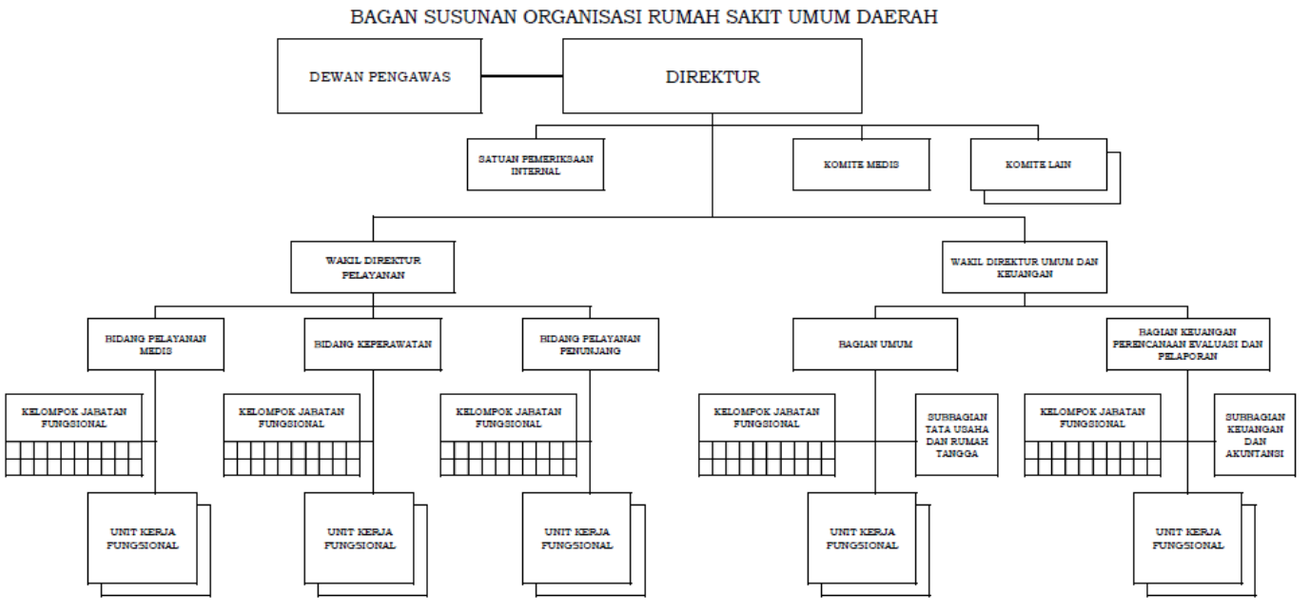

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
    1. Bidang Pelayanan Medis;
    2. Bidang Keperawatan; dan
    3. Bidang Pelayanan Penunjang.
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas:
    1. Bagian Umum, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
    2. Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
d. Satuan Pemeriksaan Internal;
e. Komite Medis;
f. Komite Lain; dan
g. Unit Kerja Fungsional.

Secara umum berikut bagan struktur Organisasi RSUD Kota Yogyakarta

2.1.3. Rumah Sakit Pratama

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

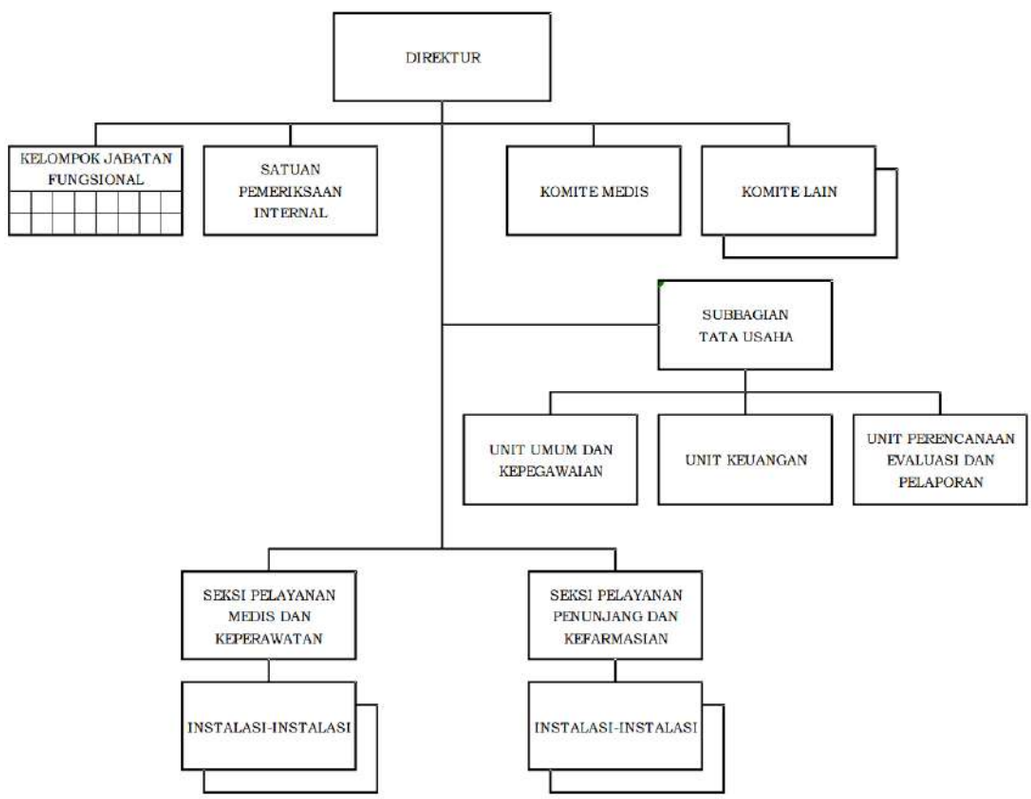

Struktur Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dipimpin oleh Direktur, yang membawahi :

- Kelompok Jabatan Fungsional
- Satuan Pemeriksaan Internal
- Komite Medis
- Komite Lain
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
- Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi Unit Umum dan Kepegawaian, Unit Keuangan, Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi Instalasi-instalasi medis
- Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian membawahi unit pelayanan penunjang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Tahun 2025 sebanyak 812 orang ASN tersebar di Dinas Kesehatan termasuk UPT (Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT PSC YES 119) dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Distribusi pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai menurut pangkat Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOL	DINAS	PUSK/UPT	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	2	34	36
	Pembina Tk I	IV/b	1	38	39
	Pembina	IV/a	17	26	43
2	Penata Tk I	III/d	10	156	166
	Penata	III/c	9	47	56
	Penata Muda Tk I	III/b	10	88	98
	Penata Muda	III/a	17	20	37
3	Pengatur Tk I	II/d	3	112	115
	Pengatur	II/c	6	138	144
	Pengatur Muda Tk I	II/b	0	0	0
	Pengatur Muda	II/a	0	1	1
4	Juru Tk I	I/d	0	0	0
	Juru	I/c	0	0	0
	Juru Muda Tk I	I/b	0	0	0
	Juru muda	I/a	0	0	0

NO	PANGKAT	GOL	DINAS	PUSK/UPT	Jumlah
5	PPPK	X	0	5	5
		IX	2	1	3
		VII	0	68	68
		V	0	1	1
	JUMLAH TOTAL		**77**	**735**	**812**

Sumber data : Dinas Kesehatan 2025 (data diolah)

Selain menurut jenis kepangkatan, pembagian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan juga dibagi menurut tingkat pendidikan, adapun distribusi menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	185
2	S1/D4	132
3	D3	461
4	D1	1
5	SMA/SLTA	32
6	SMP	1
7	SD	0
	JUMLAH	812

Sumber data : Dinas Kesehatan 2025 (data diolah)

Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	9
5	Kepala Sub Bagian	2
6	Kepala Sub Bagian TU	20
7	Kepala UPT	2
8	Direktur	0
9	Administrator Kesehatan Ahli Muda	6
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	10
11	Analis Kebijakan Ahli Madya	0
12	Analis Kebijakan Ahli Muda	3
13	Apoteker Ahli Madya	6
14	Apoteker Ahli Muda	10
15	Apoteker Ahli Pertama	21
16	Arsiparis Terampil	1
17	Asisten Apoteker Mahir	2
18	Asisten Apoteker Penyelia	10
19	Asisten Apoteker Terampil	27
20	Asisten Penata Anestesi Terampil	1
21	Bidan Ahli Madya	5
22	Bidan Ahli Muda	1
23	Bidan Mahir	5

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
24	Bidan Penyelia	34
25	Bidan Terampil	55
26	Dokter	4
27	Dokter Ahli Madya	33
28	Dokter Ahli Muda	21
29	Dokter Ahli Pertama	43
30	Dokter Gigi Ahli Madya	25
31	Dokter Gigi Ahli Pertama	6
32	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	4
33	Epidemiolog Kesehatan Terampil	13
34	Fasilitator Pemerintahan	2
35	Fisikawan Medis Ahli Pertama	1
36	Nutrisionis Ahli Madya	4
37	Nutrisionis Ahli Muda	1
38	Nutrisionis Mahir	4
39	Nutrisionis Penyelia	12
40	Nutrisionis Terampil	22
41	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	1
42	Penata Anestesi Ahli Pertama	2
43	Penata Layanan Kesehatan	3
44	Penata Layanan Operasional	5
45	Penelaah Teknis Kebijakan	15
46	Pengadministrasi Perkantoran	14
47	Pengolah Data dan Informasi	32
48	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	1
49	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	12
50	Perawat Ahli Madya	7
51	Perawat Ahli Muda	6
52	Perawat Gigi Ahli Madya	7
53	Perawat Gigi Mahir	1
54	Perawat Gigi Penyelia	15
55	Perawat Gigi Terampil	3
56	Perawat Penyelia	45
57	Perawat Terampil	68
58	Perekam Medis Penyelia	10
59	Perekam Medis Terampil	32
60	Perencana Ahli Pertama	0
61	Pranata Komputer Ahli Muda	1
62	Pranata Komputer Ahli Pertama	4
63	Pranata Komputer Terampil	1
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	19
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	34
67	Psikolog Klinis Ahli Pertama	2
68	Radiografer Terampil	6
69	Sanitarian Ahli Madya	4
70	Sanitarian Ahli Pertama	1
71	Sanitarian Penyelia	2
72	Sanitarian Mahir	3
73	Sanitarian Terampil	5
74	Teknisi Elektromedis Terampil	2

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
75	Teknisi Transfusi Darah Terampil	2
76	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	5
71	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	4
78	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	5
	Jumlah	812

Sumber data : Dinas Kesehatan s/d. Juli 2025 (data diolah)

2.2.2. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Yogyakarta

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024 yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
	TENAGA KESEHATAN							
A.	***Tenaga Medis :***	**44**	**5**	**4**	**2**	**6**	**10**	**71**
1	Dokter Umum	10	1	4	2		-	17
2	Dokter Spesialis	28	3	-		4	6	41
3	Dokter Sub Spesialis	3	1	-	-	-	4	8
4	Dokter Gigi, termasuk Drg.Sps	3	-	-	-	2	-	5
	TENAGA KESEHATAN DAN STRUKTURAL	**355**	**14**	**14**	**57**	**0**	**0**	**440**
B.	***Tenaga Keperawatan:***	**218**	**2**	**9**	**39**	**0**	**0**	**268**
1	S2 Keperawatan Anak	1	-	-	-	-	-	1
2	S2 Medikal Bedah	1	-	-	-	-	-	1
3	S2 Medikal Bedah + profesi	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Keperawatan Kritis	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Keperawatan Kronis	1	-	-	-	-	-	1
6	S1 Keperawatan + Ners	57	1	-	12	-	-	70
7	D IV Keperawatan Gadar + Ners	4	-	-	-	-	-	4
8	D IV Keperawatan Bedah + Ners	3	-	-	-	-	-	3
9	D IV Keperawatan Anak + Ners	3	-	-	-	-	-	3
10	DIV Keperawatan Gadar	1	-	-	-	-	-	1
11	DIV Keperawatan Bedah	1	-	-	-	-	-	1
12	D III Keperawatan	144	1	9	27	-	-	181
C.	***Tenaga Psikologi Klinis :***	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
1	S2 Psikologi (Psikolog Klinis)	1	-	-	-	-	-	1

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
D.	***Tenaga Bidan :***	**26**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**29**
1	D III Bidan	20	-	-	3	-	-	23
2	DIV Bidan Klinik	6	-	-	-	-	-	6
E.	***Tenaga Kefarmasian:***	**33**	**1**	**1**	**5**	**0**	**0**	**40**
1	Apoteker + S2 Farmasi Klinis	2	-	-	-	-	-	2
2	Apoteker	10	1	1	-	-	-	12
3	D III Farmasi	21	-	-	5	-	-	26
F.	***Tenaga Kesehatan Masyarakat:***	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**
1	DIV Keperawatan	-	-	-	-	-	-	0
2	DIV Keperawatan (alih jabatan Promkes)	1						1
3	S1 Kesehatan Masyarakat (Kesling)	1	-	-	-	-	-	1
4	D III Kesehatan Lingkungan	4	-		1	-	-	5
G.	***Tenaga Gizi/Dietisien:***	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
1	S1 Gizi	1	-	-	-	-	-	1
2	D IV Gizi	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Gizi	6	1	-	-	-	-	7
H.	***Tenaga Keterapian Fisik:***	**8**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**9**
1	D IV Fisioterapi	3	-	-	-	-	-	3
2	D III Fisioterapi	2	-	-	-	-	-	2
3	D III Okupasi Terapi	1	-	-	-	-	-	1
4	D III Terapi Wicara	2	-	-	-	-	-	2
5	DIII Akupuntur	-	-	1	-	-	-	1
I.	***Tenaga Keteknisian Medis:***	**27**	**5**	**2**	**7**	**0**	**0**	**41**
1	S1 Kesehatan Masyarakat (SIMRS)	2	-	-	-	-	-	2
2	D III Perekam Medis	17	-	2	6	-	-	25
3	D1 Teknisi Transfusi Darah	-	5	-	-	-	-	5
4	D VI Perawat Gigi	1	-	-	-	-	-	1
5	D III Perawat Gigi	3	-	-	-	-	-	3
6	D IV Keperawatan Anestesi	3	-	-	1	-	-	4
7	D III Anasthesi	1	-	-	-	-	-	1
J.	***Tenaga Teknis Biomedika:***	**28**	**5**	**1**	**2**	**0**	**0**	**36**
1	D IV Teknik Radiologi	2	-	-	-	-	-	2

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
2	D IV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Teknik Radiologi	3	3	1	-	-	-	7
4	SI Teknik	2	-	-	-	-	-	2
5	D III Teknik Elektromedik	2	-	-	-	-	-	2
6	D IV Analis Kesehatan Laboratorium	2	-	-	-	-	-	2
7	D III Analis Kesehatan Laboratorium	15	1	-	2	-	-	18
8	S1 Fisikawan Medik	1	1		-	-	-	2
9	D III Ortotis Prostetis	-	-	-	-	-	-	0
	TENAGA NON KESEHATAN DAN STRUKTURAL	**48**	**1**	**44**	**94**	**0**	**0**	**187**
	Struktural	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
1	S2 Manajemen	0	-	-	-	-	-	0
2	Dokter Umum	2	-	-	-	-	-	2
3	S2 Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Ekonomi Pembangunan	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
6	S2 Administrasi Publik (MAP)	1	-	-	-	-	-	1
7	S2 Asuransi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
8	S2 Promosi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
9	S2 Manajemen Rumah Sakit	2	-	-	-	-	-	2
10	S1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	1
11	DIV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
	Pelaksana	**36**	**1**	**44**	**94**	**0**	**0**	**175**
10	S2 Hukum Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
11	S1 Ekonomi Manajemen	-	-	-	2	-	-	2
12	S1 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
13	S1 Pendidikan Akuntansi	-	-	-	1	-	-	1
14	S1 Ekonomi	-	-	-	1	-	-	1
15	S1 Teknik Informatika	3	-	1	2	-	-	6
16	S1 Hukum	1	-	-	2	-	-	3
17	S1 Psikologi	-	-	1	-	-	-	1
18	S1 Kesehatan Masyarakat	2	-	-	4	-	-	6
19	S1 Komunikasi	-	-	-	3	-	-	3

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
20	S1 Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
21	Apoteker	-	-	1	2	-	-	3
22	D IV IPDN	2	-	-	-	-	-	2
23	D IV Teknologi Nuklir	-	-	-	-	-	-	0
24	D III Akuntansi	2	-	-	3	-	-	5
25	D III Manajemen	-	-	1	2	-	-	3
26	D III Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
27	D III Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
28	D III Boga	1	-	-	-	-	-	1
29	D III Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	1
30	D III Farmasi	-	-	2	4	-	-	6
31	D III Kebidanan	-	-	1	1	-	-	2
32	D III Gizi	-	-	-	3	-	-	3
33	D III Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
34	D1 Administrasi Rumah Sakit	-	-	1	-	-	-	1
35	SPK	1	-	-	-	-	-	1
36	SMF	1	-	-	-	-	-	1
37	SLTA	10	-	20	30	-	-	60
38	SMK	5	-	12	33	-	-	50
39	SLTP	3	-	1	1	-	-	5
40	SD	1	-	2	-	-	-	3
Jumlah		**447**	**20**	**62**	**153**	**6**	**10**	**698**

Sumber: Data Kepegawaian tahun 2024 data diolah

2.3.1. Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pendukung Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki sarana pendukung pelayanan sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas : 18 unit (8 Puskesmas Pembantu)
2. UPT Laboratorium Kesehatan : 1 unit
3. UPT PSC YES 119 : 1 unit
4. Rumah Sehat Lansia (RUSELA) : 1 unit
5. Rumah Pemulihan Gizi (RPG) : 1 unit

Prasarana yang mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah tersebut di bawah ini :

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun 2025

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	DANUREJAN I	69.05	35.42	47.9	57.22

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
2	DANUREJAN II	59.52	39.62	40.65	49.99
3	GEDONGTENGEN	61.9	32.08	38.52	49.57
4	GONDOKUSUMAN I	59.52	32.65	31.72	45.72
5	GONDOKUSUMAN II	50	30.19	56.79	50.73
6	GONDOMANAN	54.76	33.33	59.71	54.6
7	JETIS	71.43	40	24.24	49.41
8	KOTAGEDE I	64.29	33.33	32.69	48.55
9	KOTAGEDE II	64.29	27.78	30.79	47.24
10	KRATON	61.9	33.33	27.87	45.43
11	MANTRIJERON	69.05	33.33	34.57	51.69
12	MERGANGSAN	64.29	31.48	32.95	48.47
13	NGAMPILAN	59.52	33.33	57.19	55.97
14	PAKUALAMAN	54.76	20	34.52	43.19
15	TEGALREJO	69.05	38.89	53.84	59.95
16	UMBULHARJO I	50	33.33	51.11	48.78
17	UMBULHARJO II	54.76	29.63	32.52	43.35
18	WIROBRAJAN	52.38	26.92	44.44	46.66

Sumber : Aplikasi ASPAK data sd. Juli 2025

Sesuai dalam peraturan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, standar **ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)** untuk **Puskesmas** mendasar pada **persyaratan sarana, prasarana, dan alat kesehatan minimum** yang ditetapkan pemerintah, agar Puskesmas dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Standar yang harus dipenuhi dalam pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas minimal 60% berdasarkan ASPAK dan telah tervalidasi 100% oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

2.2.3. Sarana dan Prasarana RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Rencana pemenuhan secara bertahap sarana, prasarana dan alat kesehatan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta tahun 2024 berdasarkan data yang telah dientri pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Secara umum persentase pemenuhan standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan penunjang medis dan non medis di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2024 yang tercantum pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI sebesar 87,45 %. Capaian standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan tersebut menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit yang akan mengajukan Akreditasi, karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1596-2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah sakit yang mengajukan permohonan survei akreditasi paling sedikit harus memenuhi persyaratan pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 60% berdasarkan ASPAK dan telah tervalidasi 100% oleh Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan daerah setempat sesuai dengan kewenangannya

Selain itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur No. 251/KPTS/RSUD/III/2025 jumlah sarana tempat tidur pasien yang ada di RSUD Kota Yogyakarta sebanyak 202 TT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

NO	RUANG	VIP	KELAS			Perinatal	ICU	ICCU	PICU	NICU	HCU	ISOLASI	JUMLAH
			I	II	III								
1	ANGGREK	1	1	2	12	0	0	0	0	0	0	0	16
2	BOUGENVILE	1	3	7	11	0	0	0	0	0	0	0	22
3	CEMPAKA	2	4	0	28	0	0	0	0	0	2	2	38
4	DAHLIA	2	2	16	12	0	0	0	0	0	0	2	34
5	EDELWEIS I	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	2	12
6	EDELWEIS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
8	KENANGA	1	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	15
9	PADMA	0	0	0	0	16	0	0	0	4	0	0	20
10	WIJAYA KUSUMA	0	0	0	0	0	9	6	2	0	0	0	17
11	VINOLIA A	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	VINOLIA B	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	TOTAL	25	12	29	77	16	11	6	2	4	2	18	202

Sumber: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Yogyakarta, 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2020 - 2024 yang diukur dengan indikator sasaran kinerja utama, indikator kinerja program dan pada indikator SPM untuk urusan wajib.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas	Jumlah Kematian Ibu	orang	4	1	4	4	4	4	8	0	8	2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN									
				2020		2021		2022		2023		2024	
	Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	bayi per 1000 kelahiran	7.06	11.5	6.97	10.88	6.88	10.8	10.78	7.42	10.68	9,78
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	persen	8.19	10.72	7.97	6.58	7.82	6.72	7.97	5.46	7	5,59
		Prevalensi Stunting	persen	12.4	11.23	12.2	12.88	12	10.8	12	11.76	12	11,27
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai		-		-		-		76.74		AA (90.375)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020 s/d 2024

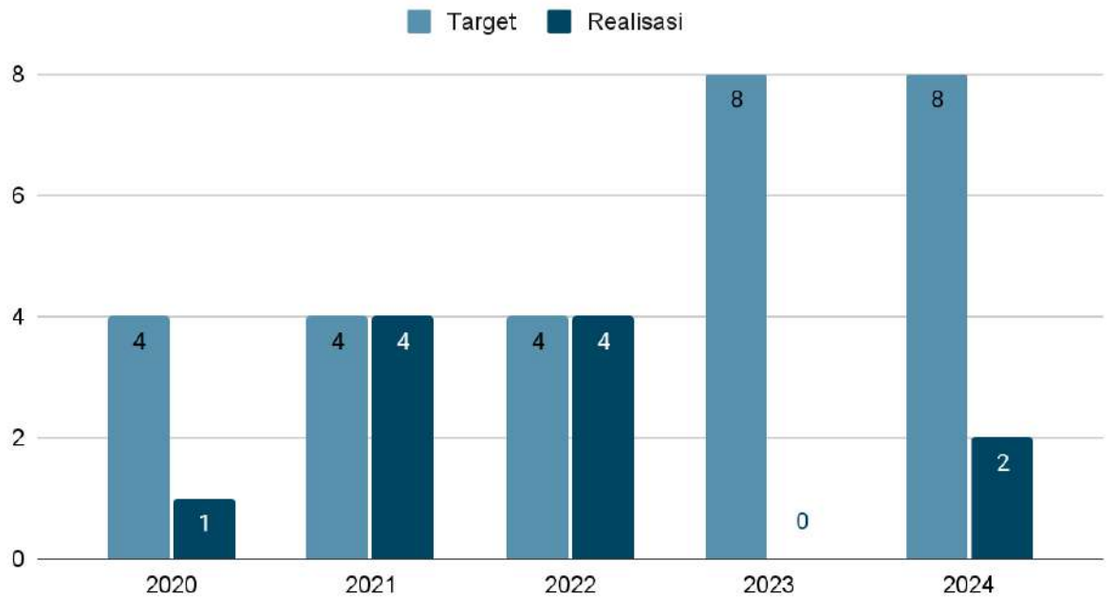

Kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai target nasional maupun target daerah, namun setiap tahunnya masih ditemukan kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta. Kematian ibu tahun 2021 disebabkan oleh pendarahan, pre eklamsi

dan jantung. Tiga kasus Kematian ibu di Kota Yogyakarta Tahun 2022 disebabkan oleh faktor resiko dekat yaitu komplikasi kehamilan dan persalinan yang dipengaruhi oleh status kesehatan ibu dengan penyakit jantung, serta terdapat satu kasus kehamilan risiko tinggi yang disebabkan oleh komplikasi persalinan (perdarahan) yang terjadi mulai dari rumah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selama tahun 2023 tidak terdapat kematian ibu hamil di Kota Yogyakarta, namun pada Tahun 2024 terdapat 2 kasus.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi kasus kematian ibu adalah upaya deteksi dini dan komplikasi melalui posyandu belum berjalan optimal, serta masih perlu meningkatkan promosi edukasi kepada masyarakat luas untuk menyebarkan informasi seputar kesehatan.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024

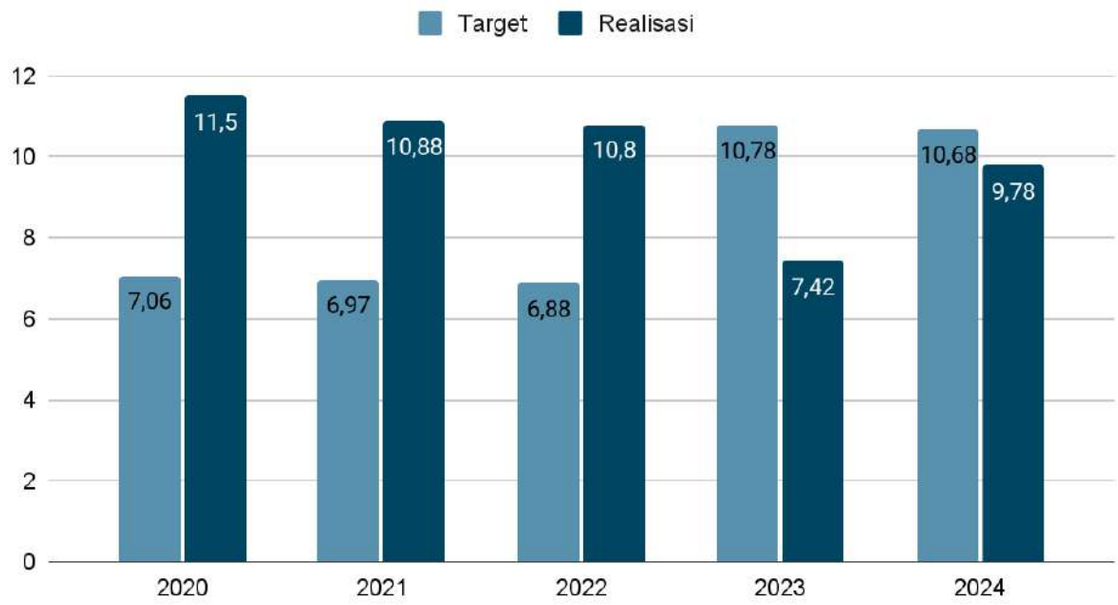

Tren angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dari Tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan, namun di tahun 2024 ditemukan 21 kasus kematian bayi dari total 2148 bayi lahir hidup. Tahun 2024 ada kenaikan jumlah kasus kematian bayi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 3 kasus. Peningkatan kasus kematian bayi karena adanya peningkatan kasus BBLR dan kelainan kongenital. Tantangan dalam upaya pencapaian AKB antara lain adalah status gizi dan nutrisi yang baik selama siklus hidup sangat penting untuk mencegah kematian ibu maupun kematian bayi, tingginya anemia remaja putri dan anemia ibu hamil menjadi faktor yang berkontribusi terhadap

tingginya BBLR dan prematuritas serta kelainan kongenital yang menjadi penyebab terbanyak kasus kematian bayi di kota Yogyakarta Tahun 2024.

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Wasting merupakan masalah gizi yang bersifat akut yang berkaitan dengan asupan yang kurang atau penyakit infeksi. Wasting berdampak pada gangguan pertumbuhan pada anak. *Wasting* adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dengan Z-score < -2 SD (gizi buruk dan gizi kurang). Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2020 - 2024

Trend prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain masih ditemukan petugas Puskesmas yang tidak melakukan plotting di Grafik Pertumbuhan Anak pada buku KIA pada saat pemantauan pertumbuhan balita, dan belum semua balita yang mengalami *weight faltering* (tidak naik berat badan) dan balita *underweight* (berat badan kurang) dilakukan rujukan dari posyandu ke puskesmas.

4. Prevalensi Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Untuk indikator ini merupakan

indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya akan semakin baik.

Persentase target dan realisasi indikator prevalensi stunting dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020 s/d 2024

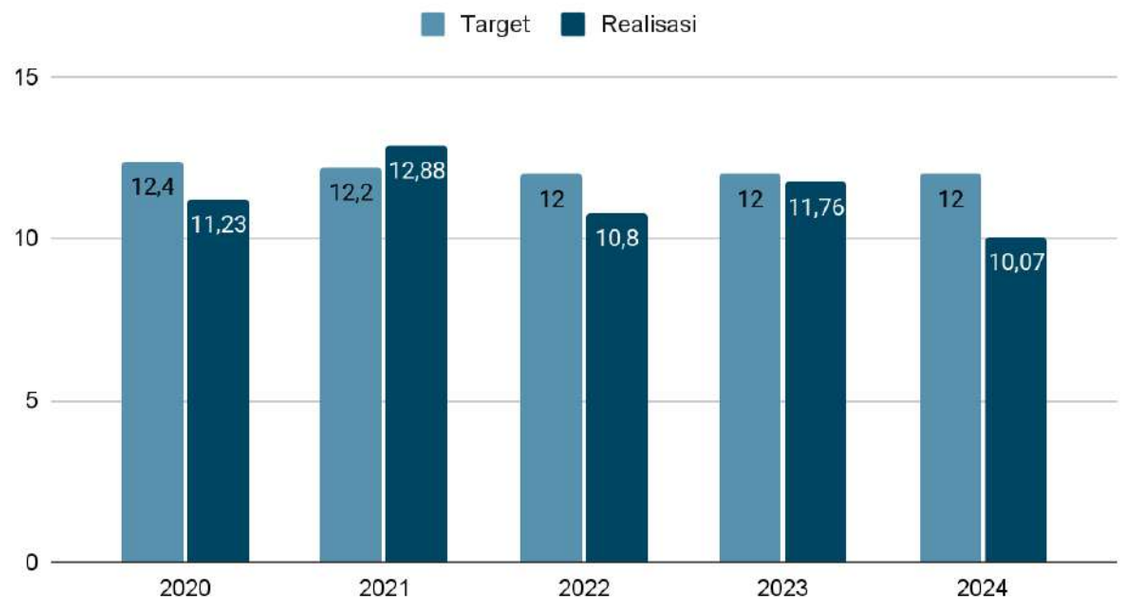

Trend prevalensi stunting di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, dimana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang RAD 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi spesifik ini sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan melalui 18 puskesmas di Kota Yogyakarta. Intervensi sensitif ini sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan bermitra dengan OPD terkait, seperti DP3AP2KB, BAPPEDA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 2. 7 Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan ketentuan 1 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2 dan 2 kali trimester 3	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % dengan catatan: Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				waktu satu tahun dibagi sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%											
		Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal I (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.3%	100%
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah balita yang melakukan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	78.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang melakukan skrining kesehatan 1 kali	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%										
		Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.3%	100%
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Persentase rumah, TTU, TPM yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan serta pemeriksaan sampel air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	persen	96.20 %	90.85%	96.30 %	96.39%	96.5%	96.53%	89%	89.76%	90%	91.5%
		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau	Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra	persen	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemantren seluruhnya											
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar.Pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item obat indikator dan 5 item vaksin indikator.	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	persen	98%	98.83%	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Persentase capaian indikator Peresepan Obat Rasional di Puskesmas meliputi indikator peresepan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia, indikator peresepan antibiotik pada Diare Non Spesifik dan indikator rerata item per lembar resep	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	persen	95%	97.80%	95%	97.92%	95%	99.41% %	95%	100%	95%	99.96%
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%											
		Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia produktif 15-59 tahun mendapat deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	87,13%	76%	100%	77%	100%
		Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%
		Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap orang terduga TB dilakukan pemeriksaan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap orang berisiko tertular HIV yang periksa ke fasilitas kesehatan dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Setiap kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dilakukan penyelidikan Epidimiologi	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Setiap kejadian luar biasa dilakukan penyelidikan epidimiologi kurang dari 24 jam di wilayah Kelurahan	Cakupan KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di Puskesmas	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kasus kegawatdaruratan pra fasilitas kesehatan yang tertangani oleh PSC baik ditangani langsung maupun dispatch melalui jejaring PSC	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah Penduduk	persen	100%	100.65%	100%	101.1% (dari 95% UHC)	100% (dari 95% UHC)	105.23 % (dari 95% UHC)	100%	100.56 %	100%	100.01%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				sesuai Data Konsolidasi Bersih yang berlaku saat itu											
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang sudah Terakreditasi dan yang sudah siap untuk dilakukan survei akreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	persen	82.05 %	84.21%	84.62 %	89.47%	87.18 %	94.44%	86.84 %	100%	100%	100%
		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya, yaitu keluarga mengikuti program KB, persalinan di Fasilitas Kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan Balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai saran air bersih dan keluarga menggunakan jamban	Jumlah pendataan keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0 – 1	persen	-	-	-	-	-	-	41.00	44.30	42	44.7

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			sehat												
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei adalah Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu	skor	72.50	81.92	75	82.06	77	82.75	80	82.85	80,5	86,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei adalah Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	skor	80	80.85	80.50	82.51	81	83.62	80	83.74	82	84.33
		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	skor	-	-	-	-	-	-	61	74.61	62	121.97
		Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	skor	-	-	-	-	-	-	46	70.54	51	79.57%
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	Tenaga Kesehatan yang melaksanakan praktik dan memiliki izin praktik di Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta	jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali	persen	85%	92.12%	90%	99.22%	90%	99.50%	95%	102.89 %	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				100%											
		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK dengan skala 1 - 5	Penjumlahan dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK ; dibagi 4 .	skor	-	-	-	-	-	-	5	5	4.6 skala 0-5	5.00
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan standar usaha di Kota Yogyakarta	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%	100%
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	96.65%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	80%	98.46%	80%	90.80%
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Kota Yogyakarta	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	90%	92.00%
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Kelurahan Siaga Aktif Mandiri adalah yang memenuhi 8 indikator stratifikasi Kesi, yaitu: (1) Pertemuan forum; (2) Jumlah KPM/ Kader Teknis; (3) Kemudahan pelayanan akses;	Terhitung dari jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi 8 kriteria indikator dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	persen	-	-	-	-	-	-	80	84.44%	80	86.67%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(4) Posyandu dan UKBM aktif; (5) Akomodasi dana; (6) Pendanaan pihak ketiga; (7) Peraturan Tk. Kelurahan; (8) Capaian PHBS												
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian terhadap laporan SAKIP yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan	sesuai dengan penialian yang diberikan oleh Inspektorat									A	A	A

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa hasil capaian indikator program Dinas Kesehatan mulai tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, dari 35 indikator sebanyak 34 indikator telah mencapai target atau melebihi dari target yang telah ditentukan dan ada satu indikator tidak mencapai target pada tahun 2022 pada indikator program "Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar" dimana target indikator tersebut pada Tahun 2022 sebesar 100 persen hanya tercapai 87.13%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan.
b. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sehat sehingga enggan melakukan deteksi dini.
c. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan dibidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait.
d. Upaya deteksi dini secara massal terkendala karena pandemi covid 19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga perlu melihat zonasi untuk keamana pelaksanaan kegiatan.
e. Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah
f. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat- tempat kerja di wilayah.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sasaran strategis RSUD Kota Yogyakarta tahun periode Renstra tahun 2023-2026 adalah "Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat" dengan indikator "Hasil Akreditasi Paripurna" dan target "Lulus Akreditasi Paripurna" serta "Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta" dengan indikator "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat" dan target "nilai A (>80-90)". Capaian tahun 2023 Sampai dengan 2024 pada indikator "Hasil Akreditasi Paripurna" telah terealisasi dengan predikat Lulus Akreditasi Paripurna mengacu pada hasil penilaian Akreditasi "Lulus Paripurna" yang dilakukan bulan Oktober 2022 dengan masa berlaku 4 tahun sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026.

Selanjutnya untuk capaian indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada periode tahun 2024 terdapat perbedaan formulasi penilaian dimana penilaian RB pada OPD saat ini mengacu pada keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2024 memperoleh hasil kategori A dengan nilai akhir 87,593 dan mendapatkan predikat "Sangat Baik". Berikut Capaian indikator sasaran dan program RSUD Kota Yogyakarta apabila disandingkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Sasaran dan Program RSUD Kota Yogyakarta

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA RSUD KOTA YOGYAKARTA							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT	Presentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	8%	-	-	-	-	-	-	13,56%	-	-	-	-	-	-	169,50 %	-	-	-	-	-	-
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	79%	-	-	-	-	-	-	82,23%	-	-	-	-	-	-	104,09%	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (*Integrated Health System*)	20	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	110%	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	-	12%	60%	-	-	-	-	-	23,70%	69,42%	-	-	-	-	-	197,50 %	115,70 %	-	-	-	-
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	-	81%	82,00%	-	-	-	-	-	81,50%	86,24%	-	-	-	-	-	100,62 %	105,17 %	-	-	-	-
			Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit	-	24	26	-	-	-	-	-	24	28	-	-	-	-	-	100,00 %	107,69 %	-	-	-	-

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA RSUD KOTA YOGYAKARTA							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Terintegrasi (*Integrated Health System*)																					
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	-	-	80,00 %	80,25 %	80,50%	80,75%	81%	-	-	83,03%	86.43%	80,93%	-	-	-	-	103,79 %	108%	100,53%	-	-
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	-	-	-	80%	83%	84%	85%	-	-	-	88,89%	87,03%	-	-	-	-	-	111,11 %	104,85%	-	-
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	-	-	-	80%	84%	85%	86%	-	-	-	93,41%	94,93%	-	-	-	-	-	116,76 %	113,01%	-	-
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	AA 91,28	A 87,59	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	-	-	A (Nilai 84,13)	A (Nilai 84,19)	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
			Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	111,56 %	116,26 %	-	-	-	-	-	111,56 %	116,26%	-	-

Pada tabel diatas terdapat beberapa perbedaan target sasaran dan program antara tahun 2020 sampai dengan 2022 dikarenakan pada periode tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dimana pada saat itu terdapat 1 (satu) sasaran yang direncanakan di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020 yaitu Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat dengan indikator Hasil Akreditasi Paripurna dan satu program kegiatan yaitu program pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit dengan 3 (tiga) indikator program:

- Persentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
- Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
- Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)

Kemudian sejak tahun 2021 terdapat 2 (dua) program kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) indikator program yaitu:

- Persentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
- Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
- Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)
- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Pada tahun 2022 terdapat penambahan indikator program dari 4 (empat) indikator menjadi 5 (lima) indikator program yaitu: Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal.

Pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 pelaksanaan sasaran dan program kegiatan di RSUD Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dengan 2 (dua) sasaran yang direncanakan di RSUD Kota Yogyakarta yaitu Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat dengan indikator Hasil Akreditasi Paripurna dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta serta memiliki 5 (lima) indikator program yaitu:

- Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal
- Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS
- Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan
- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui penetapan dan penyesuaian target serta indikator kinerja bagi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Pada

tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat perubahan indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana pada tahun 2023 indikator yang ditetapkan adalah Persentase pendapatan BLUD rumah sakit kemudian setelah dilakukan perbaikan kinerja pada tahun 2024 berubah menjadi Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran meskipun secara target tetap sama yaitu 100 %.

C. Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari 12 indikator SPM yang dinilai

Tabel 2. 9 Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	78.88%	100%	88%	100%	100%
5.	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	87.13%	100%	100%
7.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan						
11.	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan tahun 2020–2024, sebagian besar indikator telah mencapai target sebesar 100%. Namun, terdapat dua indikator yang pada awal periode belum mencapai target, yaitu cakupan pelayanan kesehatan bagi balita dan warga negara usia produktif. Pada tahun 2020, Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan hanya sebesar 78,88%, meningkat menjadi 100% di tahun 2021, namun kembali turun menjadi 88% pada 2022, dan mencapai 100% pada 2023 hingga 2024. Sementara itu, cakupan pelayanan kesehatan warga usia produktif hanya mencapai 87,13% pada 2021, kemudian mencapai 100% pada 2022 hingga 2024.

Pada tahun 2020 jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 78.88% karena masih banyak balita yang tidak melakukan penimbangan minimal 8 kali selama setahun baik di Posyandu maupun di pelayanan kesehatan. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemic Covid-19 yang berefek pada tidak berjalannya pelaksanaan posyandu dan balita tidak dapat dipantau secara rutin. Kendala yang ditemui di tahun 2020 menjadi evaluasi dan perbaikan di tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 bisa mencapai 100%.

D. Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka berikut disampaikan Kinerja pencapaian SPM RSUD Kota Yogyakarta sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 2. 10 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan menangani *life saving* di Gawat Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BLS/ PPGD/ GELS/ATLS)	100%	80,30%	82%	87%	100%	100%
		Ketersediaan tim penaggulangan bencana 1 (satu) tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	≤ 4 Menit	1 menit 9 detik	1,44 menit	1,15 Menit	2 menit 29 detik	1 menit 24 detik
		Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat (IKM)	≥ 70%	93,28%	81,47%	83%	90,10%	85,00%
		Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 ‰	5,57%	1033,00%	3,54%	2,43%	4,84%
		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersedian pelayanan sesuai dengan rumah sakit kelas B	4 spesialis pelayanan dasar dan 4 spesialis penunjang, 8 spesialis	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lainnya, dan 2 sub spesialis					
		Buka pelayanan sesuai ketentuan	Senin - Kamis 09.00 - 14.00 Jum`at -Sabtu 09.00 - 13.00, standar 100%	23,69%	24%	28%	100%	100%
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	84,41 menit	92 menit	88,27 menit	81,87 menit	95,5
		Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	94,28%	82,12%	81,21%	91,97%	98,00%
		Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	98%	100%	100%	98%	100%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	97%	100%	100%	98%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. dokter b. perawat (min D3)	100%	100%	100%	100% dokter Sp dan Perawat (min.D3)	100% dokter Sp dan Perawat (min.D3)
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas B	4 spesialis pelayanan dasar dan 4 spesialis penunjang, 8 spesialis lainnya, dan 2 sub spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam Visit dokter spesialis	06.00 - 14.00 setiap hari kerja Persentase jumlah dokter yang patuh melakukan visit sesuai standar	92,71%	100,00%	96,92%	98,21%	98,01%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5 %	0%	0,00%	0%	0,53%	0,70%
		Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	0,32%	0,41%	0%	0,06%	0,30%
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/ kematian	100%	100%	100,00%	100%	99,40%	100%
		Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	2,49%	28,65%	1,69%	1,95%	2,08%
		Kejadian pulang paksa (atas permintaan sendiri)	≤ 5 %	0,70%	1,00%	0,58%	0,42%	0,39%
		Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%	96,92%	81,00%	82,62%	92,23%	92,00%
		Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	100%	70%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB	≥ 60 %	100%	96%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Bedah Sentral	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	<2 hari	< 2 hari	<2 hari	< 2 hari	< 2 hari
		Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi & salah penempatan ET*	≤ 6 %	0%	0%	0%	0%	0%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	Kejadian kematian ibu karena persalinan*	Pendarahan ≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
			Preeklamsia ≤ 30 %	0%	0%	0%	0%	0%
			sepsis ≤ 0,2 %	0%	0%	0%	0%	0%
		Pemberian pelayanan persalinan normal	Dokter SpOG, Dokter umum terlatih, Bidan	100%	100%	100%	100% Dokter SpOG, Dokter umum terlatih, Bidan	100%
		Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	tim PONEK yang terlatih*	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter Sp.An	100%	100%	100%	100% dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter Sp.An	100%
		Kemampuan menangani BBLR (1500 g - 2500 g)	100%	80,50%	93%	100%	100%	90,55%
		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	23,98%	29,57%	35,14%	61,48%	46,73%
		Persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	99,12%	85,15%	83,07%	96,55%	95,80%
6	Pelayanan Perawatan Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam	≤ 3 %	0,00%	0,00%	0,26%	0,01%	1,76%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemberi pelayanan unit intensif Dokter SpAn; dokter spesialis kasus; perawat mahir (D3) ICU/ICCU/PICU/ NICU / setara D4	100%	81,25%	71,43%	75,26%	81,13%	84,74%
7	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	1 jam 30 menit	1 jam 58menit	2 jam 7 menit	2 jam 54 menit 22 detik	2 jam 57 menit 44 detik
		Pelaksana ekspertisi	Dokter SpRad	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian kegagalan pelayanan rongten kerusakan foto	≤ 2 %	0,62%	0,56%	0,83%	0,56%	0,59%
		Kepuasan pelanggan ≥ 80%	≥ 80%	95,87%	81,41%	81,64%	89,79%	96,10%
8	Pelayanan Patologi Klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan labolatorium, kimia darah & darah rutin cito	≤ 140 menit	52 menit 28 detik	55,85 menit	51,7 menit	46 menit 62 detik	60 menit 19 detik
		Pelaksanan ekspertisi	Dokter Sp.PK	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratotium*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	94,21%	80,93%	80,93%	91,30%	97,83%
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan*	≤ 50 %	0,16%	1,40%	2,16%	1,15%	1,21%
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	0,16%	84,30%	76,96%	90,60%	96,60%
10	Pelayanan Farmasi	Waktu tunggu pelayanan : a. resep obat jadi	≤ 30 menit	10 menit 40 detik	20 menit	33 menit 16 detik	35 menit 5 detik	33 menit 06 detik
		b.resep obat racikan	≤ 60 menit	37 menit 50 detik	36 menit 40 detik	62 menit 53 detik	58 menit 9 detik	50 menit 22 detik
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*	100%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	94,29%	79,61%	84,22%	91,52%	97,70%
		Penulisan resep sesuai formularium RS	100%	87,85%	93%	95,83%	94%	94,15%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pely. Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	16,70%	20,63%	16,50%	18,96%	18,98%
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%
12	Transfusi Darah	Pemenuhan kebutuhan darah setiap pelayanan tranfusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	0%	0%	0%	0%	0%
13	Pelayanan Pasien miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan :						
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100,00%	100%	80,16%	100%	100%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100,00%	85%	82,75%	100%	100%
		Kelengkapan *Informed Concent* setelah mendapat informasi yang jelas	100%	22%	22%		100%	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	rerata ≤ 10 menit	13 menit 50 detik	1 menit 31 detik	4 menit	4 menit	menggunakan rekam medis elektronik (RME)
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	rerata ≤ 15 menit	9 menit 17 detik	12 menit 58 detik	13 menit 15 detik	9 menit 5 detik	8 menit 10 detik
15	Pelayanan Sanitasi / Pengelolaan limbah	Baku mutu limbah cair : BOD COD TSS Ph	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	91%	100%	93%	100%	100%	100%
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	4,90%	16,40%	46,60%	25,40%	71%
		Cost recovery meningkat	≥ 40 %	147,00%	124,00%	155,17%	100,56%	78,82%
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap*	≤ 2 jam	52 menit	1 jam 03 menit	1 jam 46 menit	1 jam 26 menit	1 jam 07 menit
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pel Ambulance/Kereta Jenasah	Waktu Pelayanan ambulance/ kereta jenasah	24 jam	100%	100%	100%	24 jam	24 jam
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenasah di RS ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap *(respon time)* pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	21 menit 34 detik	23,35 menit	19,15 menit	17,58 menit	20,06 menit
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	88,04%	92,83%	84,00%	88,66%	80%
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	48,70%	52,33%	68,87%	48,75%	62,83%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peralatan labolatorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu	100%	94,20%	99,17%	100%	97,15%	100%
20	Pelayanan Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pencegahan & pengendalian infeksi (PPI)	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih ≥ 75 %	97,70%	98,47%	81,30%	81,30%	81,30%
		Tersedia APD di setiap instalasi	≥ 60 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi *nosokomial* /HAI *(Health care associated infection)* di RS minimal 1 parameter*	≥ 75 %	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa hasil capaian indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, dari 98 indikator sebanyak 86 indikator telah memenuhi standar (87,75%) dan 12 indikator belum memenuhi standar (12,24%).

Berikut kami sampaikan data tabel penjelasan mengenai capaian indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 beserta strategi untuk meningkatkan capaian pada beberapa indikator yang belum tercapai:

Tabel 2. 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat	≤ 2 ‰	3,54	2,43‰	4,84%	Karena sebagai rumah sakit rujukan sehingga banyak menerima kasus kompleks	Melakukan peningkatan kompetensi SDM, meningkatankan sarana prasarana di Instalasi Gawat Darurat

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Waktu tunggu di Rawat Jalan	Pelayanan Rawat Jalan	≤ 60 menit	88,27 menit	81,87 menit	95,5 menit	Pengguna pendaftar onset melalui loket pendaftaran masih lebih banyak daripada yang mendaftar mandiri via mesin antrian, perlu proses verifikasi di loket pendaftaran sehingga walaupun sudah mendaftar via mesin pendaftaran mandiri tetap harus verifikasi di loket	Merancang sistem verifikasi peserta BPJS rawat jalan dengan sistem verifikasi berbasis online
3	Jam Visit dokter spesialis	Pelayanan Rawat Inap	06.00 - 14.00 setiap hari kerja	96,92%	98,21%	98,01%	Adanya perbedaan pengambilan data pada INM dan SPM, INM terhitung pukul 06.00 - 14.00 WIB dan SPM 08.00 - 14.00 WIB	Sosialisasi kepada petugas pengambil data
4	Kematian pasien > 48 jam		≤ 0,24 %	1,69%	1,95%	2,08%	Kasus yang ditangani merupakan kasus kompleks yang memerlukan SDM dan sarana prasara yang lebih mendukung pelayanan kasus kompleks	Meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana
5	Kemampuan menangani BBLR (1500 g - 2500 g)	Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	100%	100%	100%	90,55%	Ada pasien bayi BBLR yang dirujuk dikarenakan membutuhkan penanganan dari dokter Spesialis anak dengan tambahan kompetensi Jantung	Meningkatkan kompetensi SDM dan meningkatkan jejaring rujukan sesuai kompetensi
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria		≤ 20 %	35,14%	61,48%	46,73%	Adanya ketentuan rujukan berjenjang sehingga kasus persalinan ditangai di FKTP sehingga banyak pasien yang masuk merupakan kasus kompleks	Berkoordinasi dengan faskes pertama agar melakukan peningkatan kompetensi SDM Medis dan Kesehatannya
7	Pemberi pelayanan unit intensif Dokter SpAn; dokter spesialis kasus; perawat mahir (D3) ICU/ICCU/PICU /NICU / setara D4	Pelayanan Perawatan Intensif	100%	75,26%	81,13%	84,74%	Masih ada SDM perawat yang belum bersertifikat mahir keperawatan intensif karena pelatihan yang memakan waktu 3 bulan dan berbiaya mahal	Melakukan perencanaan pengiriman perawat untuk pelatihan keperawatan intensif dengan menyediakan anggaran, dan mendaftarkan SDM perawat untuk pelatihan tersebut
8	Waktu tunggu pelayanan : a. resep obat jadi	Pelayanan Farmasi	≤ 30 menit	33 menit 16 detik	35 menit 5 detik	33 menit 06 detik	1. Beban Kerja tinggi dan jumlah tenaga apoteker serta asisten apoteker belum terpenuhi 2. Penumpukan resep pada jam sibuk antara jam 10.00-14.00 karena dokter prektek di poliklinik pada jam yang sama	1.Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga apoteker serta asisten apoteker berdasarkan beban kerja sesuai standar pelayanan kefarmasian 2. Melakukan inovasi Pengantaran Obat dan peningkatan kompetensi serta ketrampilan tenaga apoteker dan asisten apoteker untuk dapat mengefisiensikan waktu
9	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*		100%	99,99%	99,99%	99,99%	Labeling manual, obat-obatan LASA	Diusahakan labeling by sistem atau digitalisasi, meminimalisir pengadaan obat-obatan LASA

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penulisan resep sesuai formularium RS		100%	95,83%	94%	94,15%	Perkembangan layanan di RS menyebabkan kebutuhan obat baru yang belum tersedia di Formularium RS bertambah	Rapat KFT membahas tambahn obat untuk pelayanan baru di RS agar masuk dalam Formularium RS
11	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*	Pely. Gizi	100%	100%	100%	99,90%	Petugas Pramusaji kurang teliti dalam mendistribusikan paket gizi ke pasien	Pramusaji diberikan edukasi terkait kesalahan tersebut dan memastikan petugas dalam keadaan sehat
12	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	100%	68,87%	48,75%	62,83%	Bertambahnya alat tidak diiringi dengan bertambahnya SDM	Pengusulan untuk Analisa jabatan dan pemenuhan SDM

Kemudian berdasarkan data diatas secara umum untuk meningkatkan penilaian setiap unsur pelayanan pada SPM tahun berikutnya, RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kualitas nilai pelayanan yang telah ada. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan antara lain dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan perbaikan melalui kegiatan renovasi dan rehabilitasi beberapa ruang/Gedung yang digunakan untuk pelayanan medis dan non medis serta pelayanan penunjang yang menggunakan berbagai macam sumber anggaran baik APBD, dan BLUD.
2) Melakukan standarisasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
3) Melakukan pemenuhan SDM baik SDM Medis maupun Kesehatan (Perawat, Bidan, dll) serta melakukan evaluasi berkala
4) Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan pemenuhan standar pelayanan pasien, monitoring evaluasi dan umpan balik data pelayanan kepada para klinisi;
5) Melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses seluruh layanan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta melalui berbagai media;
6) Melakukan pelatihan service excellent secara rutin bagi seluruh pegawai yang ada di pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan citra positif pelayanan RSUD Kota Yogyakarta di masyarakat.
7) Melakukan evaluasi berkala pada masing-masing SPM.

E. Capaian Kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Survei Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dasar hukum penyusunan SKM adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang

kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 12 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Indikator Program	Target (dalam %)					Realisasi (dalam %)									
									2020		2021		2022		2023		2024	
				2020	2021	2022	2023	2024	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	72,5	77	77	80	80,5	76,27	81,92	77,39	82,06	81,70	82,75	82,79	82,85	86,07	86,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	

Sumber : Data Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, 2025 (Data diolah)

F. Standar Pelayanan Minimal RS Pratama

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 129/Menkes/SK/11/2008.

Tabel 2. 13 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/ PPGD/ GELS/ALS)	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	79%	80%	82%	83%	86%
		7	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	≤ 2‰	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Ketersedian pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	6 hari kerja, sesuai ketentuan RS Senin - Kamis 08.00 - 14.00 Jumat 08.00 - 11.30 Sabtu : 08.00 - 13.00	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	45 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	90%	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%
3	Pelayanan Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
		3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, Penyakit Dalam, Kebidanan, Bedah	Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas D Anak, Dalam, Obsgyn, Radiologi, Anesthesia, Patologi Klinik	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	98%	100%	98%
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%	0%	0%	0%	0%
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%	0%	0%	0%	0%
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	0%	0,29%	0%	0%	0%
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	0%	0,35%	0%	0%	0%
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		11	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%
		12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Neurotik, dan Gangguan Mental Organik	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		14	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		15	Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
4	Pelayanan Bedah Sentral	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	0%	0%	0%	0%	0,13%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
5	Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Pendarahan ≤ 1 % b. Preeklamsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	a. Pendarahan ≤ 1 % b. Preeklamsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	a. 0,4 % b. 0,26% c. 0,16 %	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%
		2	Pemberian pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	65,37%	63,59%	61,00%	52,00%	45,69%
		7	Keluarga Berencana a. Persentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
6	Pelayanan Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
		2	Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	2%	1,50%	0,85%	0,00%	0,38% %	0,00%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
8	Pelayanan Lab. Patologi Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah & darah rutin	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
		3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
10	Pelayanan Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	12 menit	a. 18 menit b. 45 menit	a. 18 menit b. 49 menit	a. 18 menit b. 49 menit	a. 18 menit b. 49 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	99,90%	99,00%	99,95%	99,98%	99,98%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	99,80%	99,90%	80,36%	86,19%	85,85%
10	Pelayanan Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	84,84%	98,77%	100%	100%	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	25,54%	22,73%	17,26%	8,18%	15,10%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	99,32%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	0%	0%	0,005%	0%	0,005%
13	Pelayanan GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100 % terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	64,34%	86,00%	83,66%	89,67%	94,00%
		2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	99,90%	100%	97,00%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pelayanan Sanitasi / Pengelola Limbah	1	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	≥ 60 %	20%	30,68%	80%	80%	75%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
		6	Cost recovery	≥ 40 %	≥ 40 %	93,93%	118,87%	97,86%	88,17%	89,77%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Ambulance / Kereta Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230menit	≤ 230menit	25 menit	25 mnt	25 mnt	25 mnt	25 mnt
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	< 15 menit	< 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit
18	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	≥ 80 %	100%	100%	100%	85%	87%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	72%	100%	100%
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pelayanan Laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	99%	99%	98%	99%	100%
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	97%	100%	100%	98%	100%
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	75%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health care associated infection) di RS minimal 1 parameter*	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Pelayanan CSSD	1	Ketepatan waktu sterilisasi instrumen cito menggunakan autoclave	Tidak ada standar	86%	86,00%	0,00%	100%	100%	100%
		2	Keberhasilan penggunaan indikator strip internal di semua instrument	Tidak ada standar	100%	100%	95,09%	92%	99%	100%

Sumber : Tim Mutu Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, 2025 (Data diolah)

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.4.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi dalam 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) seksi. Setiap seksi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sesuai dengan fokus pada seksi masing-masing. Berdasarkan tugas dan fungsinya, prioritas pelayanan Dinas Kesehatan ditujukan terutama kepada fasilitasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang termasuk dalam layanan Standar Pelayanan minimal (SPM). Pelaksanaan dan evaluasi SPM pada tahun 2024 mendasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Sementara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan, isu penting dan strategis yang berkembang, baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis menentukan sasaran dan program pembangunan Kota Yogyakarta khususnya di bidang kesehatan.

Dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 terdapat salah satu permasalah daerah yang menyangkut urusan kesehatan yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Perumusan masalah tersebut merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah. Berdasarkan masalah tersebut, masalah pokok Dinas Kesehatan dipecahkan melalui rumusan dibawah ini:

1. Misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta terkait yaitu: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
2. Tujuan Dinas Kesehatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Sasaran Dinas Kesehatan : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Permasalahan	Akar/Penyebab Masalah
1.	Masih terdapat Kematian Ibu (Hamil/Bersalin), Bayi, Balita dengan berbagai penyebab Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Tingkat Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat yang masih perlu ditingkatkan. Regenerasi kader kesehatan belum berjalan secara merata dan kompetensi kader kesehatan belum optimal	1. Pengetahuan masyarakat terhadap risiko kehamilan, persalinan, dan nifas belum optimal 2. Kurangnya kewaspadaan pada faktor risiko kehamilan dan persalinan baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan 3. Penduduk yang beragam/heterogen dan pendatang dari berbagai wilayah, baik yang tinggal atau komuter memiliki budaya/kebiasaan yang dibawa berbeda-beda. Meskipun pengetahuan masyarakat sudah ada, namun jika tidak diikuti dengan kemauan dan sikap maka tidak ada perubahan perilaku. 4. Regenerasi kader berjalan namun belum merata karena bagi kelompok usia produktif, cukup sulit membagi waktu untuk bekerja dan aktif mengikuti kegiatan posyandu. 5. Peningkatan kompetensi kader belum optimal karena masih terbatasnya sumber daya.
2.	1. Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal 2. Capaian ASPAK Puskesmas yang belum optimal	1. Pemahaman sistem rujukan di fasyankes dan masyarakat masih kurang 2. Adanya perubahan aplikasi ASPAK sesuai dengan kluster 3. Masih diperlukan penyesuaian alur pencatatan pelaporan barang (SIMBARA) dengan ASPAK
3.	1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain: HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain. 2. Belum optimalnya implementasi Integrasi Data / sistem informasi kesehatan antar program maupun antar sektor	1. Masih adanya stigma di masyarakat, terhadap penyakit TB dan HIV 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit 3. Kurangnya kesadaran masyarakat penderita PTM untuk kontrol rutin 4. Banyaknya sistem pelaporan Program namun belum adanya aplikasi terintegrasi dari Pusat (ASIK) yang memenuhi kebutuhan data program secara keseluruhan.
4.	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.	1. Pemenuhan obat dan reagen program sangat bergantung dari pemerintah pusat. 2. Tidak ada formasi di peta jabatan dan pengadaan sumber daya manusia.

No	Permasalahan	Akar/Penyebab Masalah
	belum optimalnya jaminan pemenuhan ketersediaan obat, reagen untuk pelayanan dasar dan program, serta sarana dan prasarana penyimpanan logistik kefarmasian. Belum optimalnya cakupan sertifikasi dan lisensi bidang kesehatan	belum dan standar penilaian kompetensi. 3. Integrasi dan interoperabilitas sistem pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang kesehatan. 4. Kurang optimalnya sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada pelaku usaha. 5. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor.

Identifikasi permasalahan tersebut di atas sebagai faktor kelemahan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Melihat faktor penghambat yang ada menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan harus menjalin kerja sama baik lintas program maupun lintas sektoral serta meningkatkan peran serta masyarakat.

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan kesehatan baik internal maupun eksternal dalam pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats). Berikut hasil dari analisis permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan :

Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain adalah adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan Daerah, adanya kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap kelurahan, lingkungan yang kondusif yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di setiap wilayah di Kota Yogyakarta.

Kelemahan (Weakness)

Sedangkan Kelemahan (Weakness) yang masih harus dihadapi di Kota Yogyakarta adalah masih terjadinya kasus penyakit yang terlambat ditangani dikarenakan adanya keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga, kondisi gedung fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kurang memadai sesuai standar pelayanan, serta masih belum tercukupinya Sumber Daya Manusia kesehatan dan belum terpenuhi kebutuhan SDM sesuai Analisis jabatan.

Peluang (Oppoturnities)

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kesehatan adalah banyaknya fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kota Yogyakarta, Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah yang melaksanakan PPK BLUD, adanya kader kesehatan di setiap RW, adanya regulasi bidang kesehatan yang mendukung upaya kesehatan, serta adanya perguruan tinggi bidang kesehatan yang mendukung peningkatan tenaga kesehatan yang kompeten

Ancaman (Treats)

Sedangkan ancaman dalam pelayanan kesehatan antara lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku sehat masih rendah, dinamika epidemiologi penyakit yang cepat, mobilitas masyarakat terutama ibu hamil dan status kependudukan yang menyulitkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan, kepadatan penduduk, kepadatan hunian dan kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

2.4 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Tabel 2. 15 Teknis Penyimpulan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Akses layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan berbasis masyarakat	- Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal - Regenerasi kader kesehatan belum berjalan secara merata dan kompetensi kader kesehatan belum optimal - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan	1. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola (integrasi pelayanan kesehatan primer) Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 "terwujudnya Kesehatan untuk semua" : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	- Masih terdapat Kematian Ibu (Hamil/Bersalin), Bayi, Balita dengan berbagai penyebab - Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau piblik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi 4. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Double burden of malnutrition SDGs zero hunger.	Target stunting nasional 18 % Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 “terwujudnya Kesehatan untuk semua” : Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita.	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY 2022-2027: Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Peningkatan kualitas gizi masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau piblik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	SDGs zero hunger	Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 "terwujudnya Kesehatan untuk semua" : Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita. Target stunting nasional 18 %	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY : Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Pencegahan stunting
Pengendalian Penyakit dan pembudayaan hidup sehat	Tingkat Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat yang masih perlu ditingkatkan.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau publik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh yang belum	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Peningkatan prevalensi NCDs	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 :Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Hidup	Peningkatan kesehatan melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		seluruhnya teratasi		Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Sehat Yogyakarta Sehat lestari Tahun 2021-2025	
	- Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain: HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain. - Belum optimalnya implementasi Integrasi Data / sistem informasi kesehatan antar program maupun antar sektor	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah 3. Kurangnya ruang terbuka hijau	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 “terwujudnya Kesehatan untuk semua” : Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 :Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa/ wabah)	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk bidang kesehatan menitikberatkan pada perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. Isu strategis tersebut di atas menjadi agenda penting dalam pembangunan kesehatan Kota Yogyakarta guna pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, dan indikator daerah serta mendukung SPM dan SDGs sebagai komponen penting dalam pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat". SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SDG's merupakan indikator yang menyetarakan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat global, yaitu melalui peningkatan status gizi balita, penurunan angka kematian ibu dan bayi, memberantas penyakit menular dan tidak menular.

Untuk mematahkan isu-isu strategis dilakukan melalui analisa SWOT, sebagai berikut :

A. Kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun. Adapun yang termasuk sebagai kekuatan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan;
2. Adanya peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan;
3. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber;
4. Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang lama.

B. Kelemahan :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
2. Profesionalisme tenaga kesehatan dan kemampuan petugas dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan;
3. Kualitas Pelayanan kesehatan yang belum optimal;
4. Sistem informasi kesehatan yang belum optimal;
5. Kesejahteraan sumber daya manusia masih kurang.

C. Peluang

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal didapat yang termasuk peluang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Pertambahan jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan berupa gedung/bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.

3. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan
4. Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi
5. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam implementasi program kesehatan cukup baik

D. Ancaman :

1. Anggaran yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana bila tidak diikuti dengan perencanaan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam berbagai lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan harus diikuti dengan follow up dan monitoring serta evaluasi pasca pelatihan.
3. Pertambahan jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan baik gedung/ bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan semakin meningkat harus dikelola dengan baik, terpelihara dan dievaluasi pemanfaatannya.
4. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2.4.1.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinkes

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di sekeliling Dinas Kesehatan Kota yogyakarta, yang dapat terdiri atas kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, lingkungan fisik, lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, demografi, stakeholders yang sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Komparasi capaian sasaran indikator kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan capaian indikator Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.

Arah pembangunan kesehatan nasional pada periode 2025–2029 mengacu pada visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam 8 misi Asta Cita. Salah satu misi yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor kesehatan adalah Misi ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan penguatan sistem kesehatan nasional. Misi ini menempatkan kesehatan sebagai pilar utama dalam membentuk SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah menetapkan 17 program prioritas nasional, dengan salah satu program yang selaras dengan kesehatan yaitu program ke-7, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Dalam program hasil terbaik cepat (*Quick Win*), menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas.

2.4.1.2. Analisis Keselarasan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai dinas daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Kesehatan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terkait

urusan tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan indikator yang diamanatkan oleh Kementrian Kesehatan yang termasuk dalam indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 16 Keselarasan Indikator RIBK dengan Indikator Renstra Dinas Kesehatan 2025-2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)		Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2025-2029
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1	Jumlah kematian ibu	Indikator Sasaran Dinkes Kota Yogyakarta
	2	Prevalensi stunting	Indikator Tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
	3	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	5	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	6	Angka keberhasilan pengobatan TB	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	7	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Prevalensi obesitas > 18 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes
		Tingkat kepuasan pasien terhadap	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
		layanan kesehatan	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes (Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan)
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes (Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	diselaraskan di Indikator Program Dinkes
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	diselaraskan di Indikator Program Dinkes
		Persentase lanjut usia yang mandiri	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Cakupan penemuan kasus TB	Indikator Kegiatan Dinkes (Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
Peningkatan Efektivitas Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen)
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	masuk di Indikator kegiatan Renstra (Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP)

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	masuk di Indikator kegiatan Renstra (Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP)
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan

2.4.1.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pedoman bahwa pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, sehingga terwujud keselarasan antara pemanfaatan sumber daya dengan penggunaannya. Undang-undang tersebut juga mengharuskan kajian mengenai daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup di setiap daerah perencanaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari fase perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki tujuan mendasar untuk memastikan bahwa dimensi lingkungan dan prinsip keberlanjutan menjadi pertimbangan sentral dalam proses perencanaan pembangunan daerah. digunakan untuk memberikan masukan terhadap RPJMD Kota Yogyakarta agar pembangunan yang akan dilaksanakan lebih memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 telah memperhatikan kesesuaian kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD , utamanya dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta.

Mengacu hasil 7 isu KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, dinkes mendukung 5 isu:

a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal
b. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
c. Kurangnya ruang terbuka hijau publik
d. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi
e. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Yogyakarta
2. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
3. Pencegahan stunting
4. Peningkatan kesehatan melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
5. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

2.4.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta

Untuk memahami secara lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi RSUD Kota Yogyakarta, diperlukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis yang relevan. Permasalahan dan isu-isu tersebut tidak hanya berdampak secara lokal, namun juga berkaitan erat dengan dinamika nasional maupun global. Berikut kami sampaikan data tabel keterkaitan antara permasalahan umum, isu yang menjadi perhatian perangkat daerah, serta bagaimana isu tersebut mencerminkan konteks nasional, regional, dan global yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah:

Tabel 2. 17 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta

Potensi yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Kesehatan dimana RSUD Tergabung dalam Jejaring Pengampuan 11 Layanan Prioritas	1. Sarana, prasarana serta alat kesehatan yang belum memadai dan sesuai standar 2. Pengembangan potensi pelayanan penunjang di RSUD belum optimal 3. Pengembangan pelayanan rumah sakit yang fokus pada keselamatan pasien, masih belum optimal	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan	1. Sarana, prasarana serta alat kesehatan yang belum memadai dan sesuai standar 2. Pengembangan potensi pelayanan penunjang di RSUD belum optimal 3. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit yang fokus pada keselamatan pasien, masih belum optimal 4. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan sesuai dengan Master Plan 5. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional terutama pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) 6. Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia 7. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional Rumah Sakit 8. Keberadaannya dalam persaingan industri kesehatan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
RSUD sebagai	Akses pelayanan	Kerentanan	Komitmen	Ketimpangan	Pengelolaan	1. Optimalisasi Akses

Potensi yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
UOBK	rumah sakit belum optimal	dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan	Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan	Pelayanan Rumah Sakit 2. Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Percepatan dan Inovasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik.
RSUD Sebagai RS Type Pendidikan	Pengembangan layanan sesuai dengan wahana pendidikan berkompeten yang belum optimal	-	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pengembangan Layanan Sesuai Dengan Visi Wahana Pendidikan Berkompeten

2.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta menjadi tantangan yang memerlukan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kota, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta berperan untuk mengobati kasus rujukan seperti tuberkulosis, stunting dengan komplikasi, kematian ibu–bayi, dan penyakit tidak menular tertentu. Permasalahan dan isu strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 18 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
			Global	Nasional	Regional	
Akses layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan berbasis masyarakat	Belum optimalnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai bagian dari sistem layanan rujukan	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola (integrasi pelayanan kesehatan primer)		Penyediaan layanan rujukan yang terintegrasi dengan faskes tingkat pertama
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Terbatasnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau publik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	SDGs zero hunger	Target stunting nasional 18 %	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang danSangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY : Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Pemantapan peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai fasilitas kesehatan rujukan dalam penanganan bayi stunting dengan pemberian terapi dan obat sesuai kebutuhan medis
Pengendalian Penyakit dan pembudayaan hidup sehat	Belum maksimalnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan pengendalian	Pengelolaan persampahan yang belum optimal Penurunan kualitas dan kuantitas air	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaa	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Optimalisasi fungsi RS Pratama dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
			Global	Nasional	Regional	
	penyakit menular dan tidak menular	tanah Kurangnya ruang terbuka hijau		n hidup sehat	Penyakit Menular dan Tidak Menular (Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa/ wabah)	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Periode Tahun 2025-2029 akan tergambar pada bab ini. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk melakukan evaluasi.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah merupakan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 untuk periode Renstra tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih. Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sejalan dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 untuk periode Renstra tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendukung Misi yang ke-1 yaitu "**Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**". Serta Misi 4 yang tercantum pada RPJMD 2025-2029 yaitu: “**Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945**”.

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya akan semakin baik.

Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun adalah peluang seorang bayi yang lahir hidup akan tetap bertahan hidup sampai mencapai ulang tahunnya yang ke-5. Dalam bidang

kesehatan masyarakat dan demografi, indikator ini erat kaitannya dengan angka kematian balita. Kematian balita dipengaruhi oleh gizi, imunisasi, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, dan status sosial ekonomi.

- Jika angka kematian balita tinggi, maka probabilitas hidup hingga usia 5 tahun akan rendah.
- Sebaliknya, jika angka kematian balita rendah, maka probabilitas hidup hingga usia 5 tahun mendekati 100%.

Dalam mendukung pencapaian indikator prevalensi stunting dan probabilitas hidup hingga usia 5 tahun, maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menetapkan indikator Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat sebagai tujuan OPD.

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang menggambarkan tataran yang lebih implementatif untuk dilakukan intervensi. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator sasaran Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) tanpa kesulitan finansial. Capaian minimal UHC biasanya dipakai sebagai ambang batas untuk menilai apakah suatu wilayah sudah dianggap mencapai cakupan kesehatan. Batas minimal yang diakui adalah 98% penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan bahwa suatu daerah bisa dikatakan mencapai UHC apabila ≥98% penduduknya terlindungi dalam program JKN.

Akreditasi Rumah Sakit dipilih sebagai salah satu indikator sasaran karena merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional.

Kemudian Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai unit organisasi pelayanan publik dalam bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pencapaian Visi, telah disusun Misi ini mendukung konstruksi pencapaian Visi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara ringkas, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Balita Stunting (Persentase)	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,02	
			Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)	0,987	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979	0,981	
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Angka)	93,11	93,1	93,09	93,08	93,07	93,06	93,06	
			Angka Kematian Bayi (Angka)	9,78	9,76	9,74	9,72	9,7	9,68	9,66	
			Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama (Predikat)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta (Predikat)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Predikat)	AA (90,375)	A (86,25-89,25)	A (86,50-89,50)	A (86,75-89,75)	A (87,00-90,00)	A (87,25-90,00)	A (87,25-90,00)	
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	A (87,59)	A (86,25-89,25)	A (86,50-89,50)	A (86,75-89,75)	A (87,00-90,00)	A (87,25-90,25)	A (87,25-90,25)	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Upaya mewujudkan Misi yang ke-1 yang tercantum pada RPJMD 2025-2029 yaitu "**Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**" serta Misi 4 yaitu: "**Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945**", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Sesuai dengan siklus perencanaan dalam RPJMD 2025-2029, Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Selaras dengan RPJMD 2025-2029, Renstra Dinas Kesehatan memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 menjadi dasar dalam penahapan pembangunan dalan Renstra Dinas Kesehatan pada periode 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi.

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama selaras dengan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2025-2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasita Pembangunan Bidang Kesehatan	Peningkatan Akses Kesehatan dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas Bidang Kesehatan	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan Bidang Kesehatan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan Bidang Kesehatan.

Rangkaian pembangunan lima tahun ini menunjukkan strategi bertahap yang bersifat progresif dan saling melengkapi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Tahap I (2025-2026) berperan sebagai fondasi, di mana fokus diarahkan pada penguatan dasar dan kapasitas pembangunan di bidang kesehatan. Langkah ini penting untuk memastikan adanya infrastruktur, SDM, dan sistem yang memadai sebelum melangkah lebih jauh.

Memasuki Tahap II (2027), strategi bergeser ke peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas layanan publik. Perubahan fokus ini menandakan adanya transisi dari tahap pembentukan kapasitas menuju perluasan jangkauan dan perbaikan mutu layanan, sehingga dampak positif mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahap III (2028) menandai fase akselerasi, dengan penekanan pada percepatan pembangunan sektor kesehatan yang menjadi prioritas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap ini, fondasi yang telah dibangun sebelumnya dinilai cukup kuat untuk mendukung percepatan program yang lebih baik.

Pada Tahap IV (2029), pembangunan mulai diarahkan untuk terintegrasi dan berkelanjutan. Ini mencerminkan upaya untuk menghubungkan lintas sektor dan lintas program agar sinergis, sekaligus memastikan keberlangsungan hasil yang telah dicapai.

Pada akhir Tahap V (2030) difokuskan pada penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan pembangunan. Tahap ini menunjukkan orientasi jangka panjang, memastikan bahwa capaian pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berlanjut dan terpelihara di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, setiap tahap dirancang untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan efektivitas pencapaian target pembangunan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan Dinas Kesehatan menekankan pada isu-isu strategis pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan kesehatan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	Keterangan
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Dinas Kesehatan**		
		1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	
		2. Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	
		3. Mempercepat penurunan dan pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Mempercepat penurunan dan pencegahan stunting	
		4. Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	
		5. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		6. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	

		7. Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	
		8. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	
		9. Meningkatkan sertifikasi bidang kesehatan	Meningkatkan cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	
		10. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas	
		11. Mengimplementasikan transformasi teknologi kesehatan	Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan kesehatan	
		12. Mengimplementasikan transformasi sistem ketahanan kesehatan	Memanfaatkan produk dalam negeri dengan quality insurance, resilience health system, desain ketahanan SDMK dan tenaga cadangan.	
		RSUD Kota Yogyakarta		
		Peningkatan mutu pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, melalui: 1. Meningkatkan mutu tata kelola administrasi dan keuangan RSUD Kota Yogyakarta 2. Meningkatkan mutu pelayanan medis, pelayanan penunjang dan asuhan keperawatan RSUD Kota Yogyakarta	1. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RS sesuai standar 2. Pengembangan pelayanan pada Jejaring Pengampuan 11 Pelayanan Prioritas (KJSU-KIA-TB dll) 3. Pengembangan Layanan Home Care Rumah Sakit 4. Penambahan layanan vaksin internasional 5. Peningkatan Kompetensi SDM Medis dan	

			Kesehatan pada Pengampuan 10 Pelayanan Prioritas (KJSU-KIA-TB dll 6. Pemenuhan tenaga Medis dan Kesehatan 7. Peningkatan promosi layanan Kesehatan Ibu dan Anak	
		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Peningkatan Tata Kelola Aset dan Barang Persediaan dengan Mengoptimalkan Teknologi Informasi	
		Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Laksana dan Sistem Manajemen Rumah Sakit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima	
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip	Peningkatan Pengelolaan Arsip	
		Rumah Sakit Pratama		
		Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Layanan Penunjang dan Kefarmasian di Rumah Sakit	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	
			Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta menyusun rencana program dan kegiatan. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program-program yang dijalankan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Balita Stunting (Persentase)		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (Angka)		
					Angka Kematian Bayi (Angka)		
					Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan		Persentase ketersediaan obat indikator (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		Presentase Posyandu ILP aktif (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta		
					Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas		
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas		
					Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan		
					Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
					Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
					Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali		
					Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
					Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun		
					Prevalensi obesitas > 18 tahun		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Meningkatnya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN		
					Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang berkualitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan		Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya cakupan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Persentase ketepatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT		
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi		
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		
					Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP		
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daera		
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif		
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)	Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			(UPT Laboratorium Kesehatan)	Kesehatan Kota Yogyakarta			
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan		IKM Dinas Kesehatan (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Kesehatan (Poin)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan di Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas		
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RSUD Kota Yogyakarta) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**				**Prevalensi Balita Stunting (Persentase)**		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif			**Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)**		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)**	**1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	**1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta			Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta		
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta		Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kinerja pelayanan medis	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (unit)		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
				Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan, sumber daya keperawatan dan keselamatan pasien	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
				Meningkatnya kinerja pelayanan sistem informasi kesehatan RS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Rumah Sakit Pratama) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Balita Stunting (Persentase)		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama			Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama (Predikat)		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama		Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				417.456.502.633		426.423.625.241		437.247.050.219		449.133.893.267		464.599.998.415		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				326.934.723.719		333.584.359.340		342.051.351.021		351.350.237.593		363.449.123.471		
Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan	IKM Dinas Kesehatan (Persentase)	84,14	85	172.048.592.169	85	170.690.135.765	85	175.471.805.363	85	180.869.271.753	85	188.890.338.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)	A	A		A		A		A		A			
	Nilai SPIP Dinas Kesehatan (Poin)	4,424	3,25		3,5		3,75		4		4			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				141.197.400		144.067.242		147.721.693		151.734.539		156.957.067		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	132.232.400	1	134.921.918	1	138.346.489	1	142.107.527	1	147.001.056		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3		3		3		3		3			
	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.220.000		2.265.153		2.322.647		2.385.790		2.467.945		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	2.220.000	3	2.265.153	3	2.322.647	3	2.385.790	3	2.467.945		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				935.000		954.017		978.232		1.004.826		1.039.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	935.000	1	954.017	1	978.232	1	1.004.826	1	1.039.427		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				935.000		954.017		978.232		1.004.826		1.039.427		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	935.000	1	954.017	1	978.232	1	1.004.826	1	1.039.427		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.940.000		1.979.458		2.029.701		2.084.879		2.156.673		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.940.000	1	1.979.458	1	2.029.701	1	2.084.879	1	2.156.673		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.940.000		1.979.458		2.029.701		2.084.879		2.156.673		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.940.000	1	1.979.458	1	2.029.701	1	2.084.879	1	2.156.673		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				120.617.400		123.070.678		126.194.441		129.625.118		134.088.811		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	120.617.400	12	123.070.678	12	126.194.441	12	129.625.118	12	134.088.811		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.645.000		3.719.137		3.813.535		3.917.209		4.052.100		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.645.000	1	3.719.137	1	3.813.535	1	3.917.209	1	4.052.100		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				140.382.893.000		138.380.376.387		142.341.962.723		146.838.772.342		153.687.983.239		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.366	1.283	140.372.608.000	1.283	138.369.883.063	1.283	142.331.204.519	1.283	146.827.722.330	1.283	153.676.554.228		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				140.150.976.000		138.143.743.215		142.099.324.820		146.589.538.832		153.430.168.786		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.366	1.283	140.150.976.000	1.283	138.143.743.215	1.283	142.099.324.820	1.283	146.589.538.832	1.283	153.430.168.786		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				118.314.000		120.720.428		123.784.537		127.149.700		131.528.151		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	118.314.000	12	120.720.428	12	123.784.537	12	127.149.700	12	131.528.151		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.310.000		2.356.984		2.416.809		2.482.511		2.567.997		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	2.310.000	4	2.356.984	4	2.416.809	4	2.482.511	4	2.567.997		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				58.766.000		59.961.262		61.483.190		63.154.650		65.329.406		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	58.766.000	1	59.961.262	1	61.483.190	1	63.154.650	1	65.329.406		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				660.000		673.424		690.517		709.289		733.714		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	660.000	1	673.424	1	690.517	1	709.289	1	733.714		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.812.000		41.642.089		42.699.043		43.859.844		45.370.175		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11	40.812.000	11	41.642.089	11	42.699.043	11	43.859.844	11	45.370.175		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				770.000		785.661		805.603		827.504		855.999		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	770.000	1	785.661	1	805.603	1	827.504	1	855.999		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.840.000		16.162.176		16.572.401		17.022.932		17.609.124		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	15.840.000	4	16.162.176	4	16.572.401	4	17.022.932	4	17.609.124		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.320.000		1.346.848		1.381.033		1.418.578		1.467.427		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.320.000	2	1.346.848	2	1.381.033	2	1.418.578	2	1.467.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.540.000		1.571.323		1.611.206		1.655.007		1.711.998		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	1.540.000	2	1.571.323	2	1.611.206	2	1.655.007	2	1.711.998		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.100.000		12.346.106		12.659.473		13.003.629		13.451.414		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11	12.100.000	11	12.346.106	11	12.659.473	11	13.003.629	11	13.451.414		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				880.000		897.899		920.689		945.718		978.285		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	880.000	4	897.899	4	920.689	4	945.718	4	978.285		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.088.000		11.312.940		11.599.227		11.914.063		12.324.039		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	6	3.300.000	6	3.367.120	6	3.452.584	6	3.546.444	6	3.668.568		
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	4,178	4,378		4,478		4,578		4,678		4,778			
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.300.000		3.367.120		3.452.584		3.546.444		3.668.568		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	6	3.300.000	6	3.367.120	6	3.452.584	6	3.546.444	6	3.668.568		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				924.338.500		943.137.924		967.075.690		993.365.625		1.027.571.468		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	766.417.500	12	782.005.924	12	801.854.690	12	823.653.625	12	852.016.468		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan	90,67	90,77		90,82		90,87		90,92		90,97			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.316.800		17.669.012		18.117.485		18.610.020		19.250.864		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.316.800	1	17.669.012	1	18.117.485	1	18.610.020	1	19.250.864		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.131.600		98.086.853		100.576.480		103.310.716		106.868.262		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	96.131.600	3	98.086.853	3	100.576.480	3	103.310.716	3	106.868.262		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.112.200		91.945.022		94.278.758		96.841.787		100.176.573		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	90.112.200	2	91.945.022	2	94.278.758	2	96.841.787	2	100.176.573		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.999.900		102.033.832		104.623.640		107.467.901		111.168.601		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	99.999.900	12	102.033.832	12	104.623.640	12	107.467.901	12	111.168.601		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.616.000		5.730.226		5.875.670		6.035.403		6.243.235		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	5.616.000	12	5.730.226	12	5.875.670	12	6.035.403	12	6.243.235		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				457.241.000		466.540.979		478.382.657		491.387.798		508.308.933		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459	12	457.241.000	12	466.540.979	12	478.382.657	12	491.387.798	12	508.308.933		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89.542.000		91.362.765		93.681.435		96.228.336		99.541.773		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	69	6	5.200.000	6	5.305.765	6	5.440.435	6	5.588.336	6	5.780.773		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.200.000		5.305.765		5.440.435		5.588.336		5.780.773		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	69	6	5.200.000	6	5.305.765	6	5.440.435	6	5.588.336	6	5.780.773		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.910.464.649		15.213.740.382		15.599.862.905		16.024.017.199		16.575.876.274		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	894.538.649	12	912.732.973	12	935.899.833	12	961.342.873	12	994.447.100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.488.000		5.599.622		5.741.751		5.897.844		6.100.939		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12	5.488.000	12	5.599.622	12	5.741.751	12	5.897.844	12	6.100.939		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.390.000		43.252.185		44.350.005		45.555.689		47.124.417		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.390.000	12	43.252.185	12	44.350.005	12	45.555.689	12	47.124.417		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.660.649		863.881.166		885.808.077		909.889.340		941.221.744		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	846.660.649	12	863.881.166	12	885.808.077	12	909.889.340	12	941.221.744		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.567.067.170		1.598.938.253		1.639.517.711		1.684.089.162		1.742.081.660		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	6	767.622.620	6	783.235.555	6	803.115.531	6	824.948.744	6	853.356.184		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	56		56		56		56		56			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	57	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	6		6		6		6		6			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.418.000		57.565.505		59.026.624		60.631.301		62.719.164		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	57	1	56.418.000	1	57.565.505	1	59.026.624	1	60.631.301	1	62.719.164		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				348.514.600		355.603.156		364.629.026		374.541.701		387.439.194		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	56	348.514.600	56	355.603.156	56	364.629.026	56	374.541.701	56	387.439.194		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.000.000		34.691.537		35.572.073		36.539.123		37.797.362		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	6	34.000.000	6	34.691.537	6	35.572.073	6	36.539.123	6	37.797.362		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				146.992.020		149.981.740		153.788.556		157.969.397		163.409.136		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	146.992.020	6	149.981.740	6	153.788.556	6	157.969.397	6	163.409.136		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				181.698.000		185.393.617		190.099.252		195.267.222		201.991.328		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	6	181.698.000	6	185.393.617	6	190.099.252	6	195.267.222	6	201.991.328		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				168.892.293.000		177.185.261.271		181.233.357.236		185.533.093.395		190.129.178.827		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Layanan di Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	18	18	29.090.833.000	18	29.682.521.271	18	30.435.918.881	18	31.263.338.942	18	32.339.904.549		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas	80	81		82		83		84		85			
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				29.090.833.000		29.682.521.271		30.435.918.881		31.263.338.942		32.339.904.549		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	18	18	29.090.833.000	18	29.682.521.271	18	30.435.918.881	18	31.263.338.942	18	32.339.904.549		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				89.030.492.914		90.841.314.140		93.147.035.704		95.679.297.943		98.974.052.812		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat indikator (Persentase)	95	95,5	10.732.724.944	96	13.666.358.709	96,5	14.013.236.317	97	14.394.195.174	97,5	14.889.865.053	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	18	18	10.722.724.944	18	13.656.155.316	18	14.002.773.943	18	14.383.448.373	18	14.878.748.182		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional	95	95		95		96		96		96			
	Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				52.422.000		53.488.229		54.845.860		56.336.880		58.276.863		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	18	18	52.422.000	18	53.488.229	18	54.845.860	18	56.336.880	18	58.276.863		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				295.690.000		3.017.041.389		3.093.619.512		3.177.721.551		3.287.147.666		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	18	18	295.690.000	18	3.017.041.389	18	3.093.619.512	18	3.177.721.551	18	3.287.147.666		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.374.612.944		10.585.625.698		10.854.308.571		11.149.389.942		11.533.323.653		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12	10.374.612.944	12	10.585.625.698	12	10.854.308.571	12	11.149.389.942	12	11.533.323.653		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	42.336.187.907	100	40.958.263.777	100	41.997.915.388	100	43.139.556.941	100	44.627.676.459		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	72,88	73,33		75		78,33		80		80			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	18	18	113.424.000	18	115.730.969	18	118.668.436	18	121.894.514	18	126.092.001		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta	84.33	81		82		83		84		85			
	Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas	35.00	37.00		38.00		39.00		40.00		40.00			
	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				113.424.000		115.730.969		118.668.436		121.894.514		126.092.001		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	18	18	113.424.000	18	115.730.969	18	118.668.436	18	121.894.514	18	126.092.001		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	34.293.239.999	12	32.751.727.637	12	33.583.082.093	12	34.495.960.982	12	35.686.434.809		
	Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				34.293.239.999		32.751.727.637		33.583.082.093		34.495.960.982		35.686.434.809		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	34.293.239.999	12	32.751.727.637	12	33.583.082.093	12	34.495.960.982	12	35.686.434.809		
Meningkatnya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12	7.540.944.908	12	7.694.322.732	12	7.889.618.957	12	8.104.103.331	12	8.383.171.377		
	Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas	91	91		91		91		91		100			
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				7.540.944.908		7.694.322.732		7.889.618.957		8.104.103.331		8.383.171.377		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12	7.540.944.908	12	7.694.322.732	12	7.889.618.957	12	8.104.103.331	12	8.383.171.377		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	40.400.000	1	41.221.709	1	42.267.993	1	43.417.076	1	44.912.160		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta	84,33	81		82		83		84		85			
	Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas	35,00	37,00		38,00		39,00		40,00		40,00			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				40.400.000		41.221.709		42.267.993		43.417.076		44.912.160		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	40.400.000	1	41.221.709	1	42.267.993	1	43.417.076	1	44.912.160		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	243.275.000	12	248.223.052	12	254.523.415	12	261.442.798	12	270.445.686		
	Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				243.275.000		248.223.052		254.523.415		261.442.798		270.445.686		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	243.275.000	12	248.223.052	12	254.523.415	12	261.442.798	12	270.445.686		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				114.904.000		117.241.071		120.216.868		123.485.041		127.737.297		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang berkualitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	34	36	44.904.000	36	45.817.318	36	46.980.247	36	48.257.435	36	49.919.199		
	Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	50	25	10.000.000	35	10.203.393	45	10.462.374	30	10.746.801	30	11.116.871		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				44.904.000		45.817.318		46.980.247		48.257.435		49.919.199		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	34	36	44.904.000	36	45.817.318	36	46.980.247	36	48.257.435	36	49.919.199		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	-	18	60.000.000	18	61.220.360	18	62.774.247	18	64.480.805	18	66.701.227		
	Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		61.220.360		62.774.247		64.480.805		66.701.227		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	-	18	60.000.000	18	61.220.360	18	62.774.247	18	64.480.805	18	66.701.227		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	925.937.129	100	944.770.076	100	968.750.098	100	995.086.193	100	1.029.352.384		
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	30	30	93.000.000	30	94.891.558	30	97.300.082	30	99.945.247	30	103.386.901		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	9	1		7		3		3		3			
	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	79,57	77,4		77,6		77.8		78		78			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				3.000.000		3.061.018		3.138.712		3.224.040		3.335.061		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	9	1	3.000.000	7	3.061.018	3	3.138.712	3	3.224.040	3	3.335.061		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				90.000.000		91.830.540		94.161.370		96.721.207		100.051.840		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	30	30	90.000.000	30	91.830.540	30	94.161.370	30	96.721.207	30	100.051.840		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	832.937.129	12	849.878.518	12	871.450.016	12	895.140.946	12	925.965.483		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				832.937.129		849.878.518		871.450.016		895.140.946		925.965.483		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	832.937.129	12	849.878.518	12	871.450.016	12	895.140.946	12	925.965.483		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	1.728.436.650	100	1.763.591.906	100	1.808.355.150	100	1.857.516.450	100	1.921.480.773		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	1.728.436.650	1	1.763.591.906	1	1.808.355.150	1	1.857.516.450	1	1.921.480.773		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.631.617.900		1.664.803.927		1.707.059.748		1.753.467.267		1.813.848.615		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	1.631.617.900	12	1.664.803.927	12	1.707.059.748	12	1.753.467.267	12	1.813.848.615		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				96.818.750		98.787.979		101.295.402		104.049.183		107.632.158		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	96.818.750	1	98.787.979	1	101.295.402	1	104.049.183	1	107.632.158		
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas (Persentase)	88,44	88,97	3.946.301.120	89,3	4.026.566.270	89,46	4.128.768.012	89,7	4.241.011.232	89,75	4.384.353.470		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	780.183.700	1	796.052.120	1	816.257.404	1	838.447.887	1	864.621.494		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	52	52		52		52		52		52			
	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				433.806.700		442.630.041		453.864.815		466.203.422		482.257.324		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	52	52	433.806.700	52	442.630.041	52	453.864.815	52	466.203.422	52	482.257.324		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				346.377.000		353.422.079		362.392.589		372.244.465		382.364.170		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	346.377.000	1	353.422.079	1	362.392.589	1	372.244.465	1	382.364.170		
Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.250	1.765	2.904.223.800	1.775	2.963.293.788	1.785	3.038.507.696	1.795	3.121.111.487	1.800	3.228.588.211		
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	878		749		658		587		533			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.630	11.650		11.700		11.750		11.800		11.850			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.460	4.266		3.642		3.196		2.855		2.591			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	40	60		60		60		60		60			
	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap	96,61	96,67		96,7		96,73		96,76		96,8			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	91	93		94		94,5		95		95			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	83,9	86		87		88		90		90			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				227.300.000		231.923.131		237.809.772		244.274.784		252.686.484		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.460	4.266	227.300.000	3.642	231.923.131	3.196	237.809.772	2.855	244.274.784	2.591	252.686.484		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				38.904.000		39.695.282		40.702.822		41.809.354		43.249.076		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.630	11.650	38.904.000	11.700	39.695.282	11.750	40.702.822	11.800	41.809.354	11.850	43.249.076		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.618.379.800		2.671.635.911		2.739.447.000		2.813.920.632		2.910.819.116		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	2.618.379.800	12	2.671.635.911	12	2.739.447.000	12	2.813.920.632	12	2.910.819.116		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12	440.000	12	448.949	12	460.344	12	472.859	12	489.142		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				18.375.000		18.748.735		19.224.613		19.747.247		20.427.251		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	878	18.375.000	749	18.748.735	658	19.224.613	587	19.747.247	533	20.427.251		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.250	1.765	440.000	1.775	448.949	1.785	460.344	1.795	472.859	1.800	489.142		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				385.000		392.831		402.801		413.752		428.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	40	60	385.000	60	392.831	60	402.801	60	413.752	60	428.000		
Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.096	1.105	205.624.000	1.110	209.806.255	1.115	215.131.528	1.120	220.980.018	1.125	228.589.553		
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	84.305	81.081		85.500		86.000		86.500		87.000			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.753	34.946		35.043		35.140		35.236		35.333			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.251	17.350		17.400		17.450		17.500		17.550			
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali	100	100		100		100		100		100			
	Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun	1079	1085		1090		1095		1100		1100			
	Prevalensi obesitas > 18 tahun	10,026	10,100		10,150		10,200		10,250		10,250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				38.904.000		39.695.282		40.702.822		41.809.354		43.249.076		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	84.305	81.081	38.904.000	85.500	39.695.282	86.000	40.702.822	86.500	41.809.354	87.000	43.249.076		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.753	34.946	440.000	35.043	448.949	35.140	460.344	35.236	472.859	35.333	489.142		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.251	17.350	440.000	17.400	448.949	17.450	460.344	17.500	472.859	17.550	489.142		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				165.840.000		169.213.075		173.508.018		178.224.946		184.362.193		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.096	1.105	165.840.000	1.110	169.213.075	1.115	173.508.018	1.120	178.224.946	1.125	184.362.193		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				251.269.620		256.380.107		262.886.384		270.033.840		279.333.212		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	56.269.620	1	57.414.107	1	58.871.384	1	60.471.840	1	62.554.212		
	Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN	88,62	91,8		93,50		95,93		98,37		100,00			
	Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				56.269.620		57.414.107		58.871.384		60.471.840		62.554.212		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	56.269.620	1	57.414.107	1	58.871.384	1	60.471.840	1	62.554.212		
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Presentase Posyandu ILP aktif (Persentase)	16,24	88	5.878.696.550	92	5.521.931.352	96	5.662.088.242	100	5.816.015.757	100	6.016.292.592		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20	12	5.060.700.750	12	5.163.632.051	12	5.294.694.638	12	5.438.634.322	12	5.625.915.875		
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909		1.757		1.616		1.487		1.487			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909		1.757		1.616		1.487		1.487			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	61.600	61.550		61.550		61.550		61.550		61.550			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.804	10.589		10.483		10.378		10.274		10.172			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.980	1.818		1.673		1.539		1.416		1.416			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.708	36.428		36.788		37.148		37.508		37.868			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase lanjut usia yang mandiri	79,71	81,31		82,12		82,92		83,72		84,53			
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12,40			11,40		10,40		9,40		8,40			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.176.990.000		1.200.929.197		1.231.411.014		1.264.887.716		1.308.444.631		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909	1.176.990.000	1.757	1.200.929.197	1.616	1.231.411.014	1.487	1.264.887.716	1.487	1.308.444.631		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.500.000		2.550.848		2.615.594		2.686.700		2.779.218		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909	2.500.000	1.757	2.550.848	1.616	2.615.594	1.487	2.686.700	1.487	2.779.218		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93.390.000		95.289.491		97.708.115		100.364.373		103.820.461		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.980	1.818	93.390.000	1.673	95.289.491	1.539	97.708.115	1.416	100.364.373	1.416	103.820.461		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				215.980.350		220.373.247		225.966.730		232.109.781		240.102.574		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.804	10.589	215.980.350	10.483	220.373.247	10.378	225.966.730	10.274	232.109.781	10.172	240.102.574		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				409.070.000		417.390.213		427.984.353		439.619.383		454.757.853		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	61.600	61.550	409.070.000	61.550	417.390.213	61.550	427.984.353	61.550	439.619.383	61.550	454.757.853		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				132.974.000		135.678.603		139.122.378		142.904.510		147.825.484		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.708	36.428	132.974.000	36.788	135.678.603	37.148	139.122.378	37.508	142.904.510	37.868	147.825.484		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2.758.532.400		2.814.639.122		2.886.079.899		2.964.539.840		3.066.624.957		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	18	18	2.758.532.400	18	2.814.639.122	18	2.886.079.899	18	2.964.539.840	18	3.066.624.957		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				132.774.000		135.474.535		138.913.131		142.689.574		147.603.147		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	18	18	132.774.000	18	135.474.535	18	138.913.131	18	142.689.574	18	147.603.147		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				138.490.000		141.306.795		144.893.424		148.832.445		153.957.550		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20	12	138.490.000	12	141.306.795	12	144.893.424	12	148.832.445	12	153.957.550		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	4	351.157.000	4	358.299.301	4	367.393.604	4	377.381.435	4	390.376.717		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	16	1		1		1		1		1			
	Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas	36	39		40		41		42		43			
	Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran	45	55		60		65		70		75			
	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	89,4	90		90,5		91		91,5		92			
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				46.687.000		47.636.583		48.845.688		50.173.589		51.901.337		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	16	1	46.687.000	1	47.636.583	1	48.845.688	1	50.173.589	1	51.901.337		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				257.670.000		262.910.837		269.584.003		276.912.818		286.448.422		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	4	257.670.000	4	262.910.837	4	269.584.003	4	276.912.818	4	286.448.422		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				46.800.000		47.751.881		48.963.913		50.295.028		52.026.958		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	46.800.000	1	47.751.881	1	48.963.913	1	50.295.028	1	52.026.958		
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	466.838.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4			
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				466.838.800		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	466.838.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				940.373.000		959.499.564		983.853.448		1.010.600.138		1.045.400.558		
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi (Persentase)	100	100	940.373.000	100	959.499.564	100	983.853.448	100	1.010.600.138	100	1.045.400.558	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				207.808.000		212.034.677		217.416.512		223.327.120		231.017.478		
Meningkatnya cakupan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	6.500	1.000	207.808.000	1.000	212.034.677	1.000	217.416.512	1.000	223.327.120	1.000	231.017.478		
	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				207.808.000		212.034.677		217.416.512		223.327.120		231.017.478		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	6.500	1.000	207.808.000	1.000	212.034.677	1.000	217.416.512	1.000	223.327.120	1.000	231.017.478		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				91.422.000		93.281.463		95.649.120		98.249.403		101.632.661		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	91.422.000	1	93.281.463	1	95.649.120	1	98.249.403	1	101.632.661		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				7.150.000		7.295.426		7.480.598		7.683.963		7.948.563		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	7.150.000	1	7.295.426	1	7.480.598	1	7.683.963	1	7.948.563		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				84.272.000		85.986.037		88.168.522		90.565.440		93.684.098		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	84.272.000	1	85.986.037	1	88.168.522	1	90.565.440	1	93.684.098		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				641.143.000		654.183.424		670.787.816		689.023.615		712.750.419		
Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	30	15	641.143.000	15	654.183.424	15	670.787.816	15	689.023.615	15	712.750.419		
	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				641.143.000		654.183.424		670.787.816		689.023.615		712.750.419		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	30	15	641.143.000	15	654.183.424	15	670.787.816	15	689.023.615	15	712.750.419		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				386.674.000		394.538.693		404.552.819		415.550.848		429.860.508		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar (Persentase)	100	100	386.674.000	100	394.538.693	100	404.552.819	100	415.550.848	100	429.860.508	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.210.000		15.519.361		15.913.272		16.345.884		16.908.761		
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	30	30	15.210.000	70	15.519.361	30	15.913.272	20	16.345.884	20	16.908.761		
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.210.000		15.519.361		15.913.272		16.345.884		16.908.761		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	30	30	15.210.000	70	15.519.361	30	15.913.272	20	16.345.884	20	16.908.761		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				227.096.750		231.715.748		237.597.124		244.056.355		252.460.534		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	120	140	227.096.750	140	231.715.748	140	237.597.124	140	244.056.355	140	252.460.534		
	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	91%	92%		93%		94%		96%		97%			
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				227.096.750		231.715.748		237.597.124		244.056.355		252.460.534		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	120	140	227.096.750	140	231.715.748	140	237.597.124	140	244.056.355	140	252.460.534		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12	1	10.000.000	12	10.203.393	12	10.462.374	12	10.746.801	12	11.116.871		
	Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat	92	95		96		96		95		96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12	1	10.000.000	12	10.203.393	12	10.462.374	12	10.746.801	12	11.116.871		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				134.367.250		137.100.191		140.580.049		144.401.808		149.374.342		
Meningkatnya Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50	50	134.367.250	50	137.100.191	50	140.580.049	50	144.401.808	50	149.374.342		
	Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP	-	95,5		96		96,5		97		97,5			
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				134.367.250		137.100.191		140.580.049		144.401.808		149.374.342		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50	50	134.367.250	50	137.100.191	50	140.580.049	50	144.401.808	50	149.374.342		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				164.239.000		643.913.504		660.257.227		678.206.745		701.561.066		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)	100	100	164.239.000	100	643.913.504	100	660.257.227	100	678.206.745	100	701.561.066	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		476.333.992		488.424.235		501.702.362		518.978.684		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	-	-	0	14	476.333.992	14	488.424.235	14	501.702.362	14	518.978.684		
	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	-	-		100		100		100		100			
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0		476.333.992		488.424.235		501.702.362		518.978.684		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	-	-	0	14	476.333.992	14	488.424.235	14	501.702.362	14	518.978.684		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				164.239.000		167.579.512		171.832.992		176.504.383		182.582.382		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	12	164.239.000	12	167.579.512	12	171.832.992	12	176.504.383	12	182.582.382		
	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	86,67	100		-		-		-		-			
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				164.239.000		167.579.512		171.832.992		176.504.383		182.582.382		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	12	164.239.000	12	167.579.512	12	171.832.992	12	176.504.383	12	182.582.382		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Dinas Kesehatan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (Persentase)	14,5	43	200.050.000	57,25	200.050.000	71,5	50.000.000	85,75	50.000.000	100	50.000.000	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (UPT PSC 119 YES)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	200.050.000	1	200.050.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	200.050.000	1	200.050.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Tabel 4. 5 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Rsud Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				152.285.989.550		160.241.190.000		163.859.168.000		167.686.613.000		171.668.186.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				132.740.085.550		140.297.727.000		143.409.550.000		146.680.978.000		149.939.126.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	84,9	85,2	132.740.085.550	85,4	140.297.727.000	85,6	143.409.550.000	85,8	146.680.978.000	86	149.939.126.000	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	A	A		A		A		A		A			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	4,33	4,35		4,36		4,37		4,38		4,4			
	Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.425.000		7.574.000		7.764.000		7.972.000		8.244.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.425.000	2	7.574.000	2	7.764.000	2	7.972.000	2	8.244.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.100.000		1.122.000		1.150.000		1.181.000		1.221.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	1.100.000	2	1.122.000	2	1.150.000	2	1.181.000	2	1.221.000		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.125.000		4.208.000		4.314.000		4.431.000		4.583.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	4.125.000	2	4.208.000	2	4.314.000	2	4.431.000	2	4.583.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.745.000		8.922.000		9.147.000		9.395.000		9.717.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	8.745.000	2	8.922.000	2	9.147.000	2	9.395.000	2	9.717.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.099.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	990.000	2	1.010.000	2	1.035.000	2	1.063.000	2	1.099.000		
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				330.000		336.000		344.000		353.000		365.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	330.000	2	336.000	2	344.000	2	353.000	2	365.000		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.425.000		7.576.000		7.768.000		7.979.000		8.253.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	7.425.000	2	7.576.000	2	7.768.000	2	7.979.000	2	8.253.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.848.000		1.885.000		1.932.000		1.984.000		2.052.000		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	1.848.000	3	1.885.000	3	1.932.000	3	1.984.000	3	2.052.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.848.000		1.885.000		1.932.000		1.984.000		2.052.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	1.848.000	3	1.885.000	3	1.932.000	3	1.984.000	3	2.052.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.921.000		161.132.000		165.221.000		169.712.000		175.555.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	157.921.000	1	161.132.000	1	165.221.000	1	169.712.000	1	175.555.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51.090.000		52.129.000		53.452.000		54.905.000		56.795.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	51.090.000	1	52.129.000	1	53.452.000	1	54.905.000	1	56.795.000		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				106.831.000		109.003.000		111.769.000		114.807.000		118.760.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	106.831.000	1	109.003.000	1	111.769.000	1	114.807.000	1	118.760.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84.342.000		86.057.000		88.241.000		90.640.000		93.761.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	12	84.342.000	13	86.057.000	14	88.241.000	15	90.640.000	16	93.761.000		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				84.342.000		86.057.000		88.241.000		90.640.000		93.761.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	12	84.342.000	13	86.057.000	14	88.241.000	15	90.640.000	16	93.761.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.883.900.000		11.105.276.000		11.387.124.000		11.696.738.000		12.099.570.000		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.883.900.000	12	11.105.276.000	12	11.387.124.000	12	11.696.738.000	12	12.099.570.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.898.000.000		2.956.944.000		3.031.989.000		3.114.428.000		3.221.687.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.898.000.000	12	2.956.944.000	12	3.031.989.000	12	3.114.428.000	12	3.221.687.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.985.900.000		8.148.332.000		8.355.135.000		8.582.310.000		8.877.883.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.985.900.000	12	8.148.332.000	12	8.355.135.000	12	8.582.310.000	12	8.877.883.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				794.444.550		810.601.000		831.171.000		853.767.000		883.167.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	794.444.550	11	810.601.000	11	831.171.000	11	853.767.000	11	883.167.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290	304		306		308		310		312			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.620.000		47.568.000		48.775.000		50.101.000		51.826.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	46.620.000	3	47.568.000	3	48.775.000	3	50.101.000	3	51.826.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.824.550		77.366.000		79.329.000		81.485.000		84.291.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	75.824.550	11	77.366.000	11	79.329.000	11	81.485.000	11	84.291.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				372.000.000		379.565.000		389.197.000		399.777.000		413.543.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290	304	372.000.000	306	379.565.000	308	389.197.000	310	399.777.000	312	413.543.000		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		306.102.000		313.870.000		322.404.000		333.507.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	300.000.000	2	306.102.000	2	313.870.000	2	322.404.000	2	333.507.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				120.801.460.000		128.116.280.000		130.918.950.000		133.850.770.000		136.667.060.000		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	120.801.460.000	1	128.116.280.000	1	130.918.950.000	1	133.850.770.000	1	136.667.060.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				120.801.460.000		128.116.280.000		130.918.950.000		133.850.770.000		136.667.060.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	120.801.460.000	1	128.116.280.000	1	130.918.950.000	1	133.850.770.000	1	136.667.060.000		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				19.545.904.000		19.943.463.000		20.449.618.000		21.005.635.000		21.729.060.000		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta				19.545.904.000		19.943.463.000		20.449.618.000		21.005.635.000		21.729.060.000	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	
	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit (Persentase)	85	86		86,5		87		87,5		88		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar (Persentase)	64,51	64,8		65		65,2		65,4		65,42			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19.230.000.000		19.621.135.000		20.119.112.000		20.666.144.000		21.377.879.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja pelayanan medis	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	3	1	5.135.000.000	1	5.239.445.000	1	5.372.419.000	1	5.518.492.000	1	5.708.546.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	17	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.535.000.000		2.586.561.000		2.652.205.000		2.724.316.000		2.818.139.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	17	1	2.535.000.000	1	2.586.561.000	1	2.652.205.000	1	2.724.316.000	1	2.818.139.000		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				2.600.000.000		2.652.884.000		2.720.214.000		2.794.176.000		2.890.407.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	3	1	2.600.000.000	1	2.652.884.000	1	2.720.214.000	1	2.794.176.000	1	2.890.407.000		
Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	2	14.095.000.000	2	14.381.690.000	2	14.746.693.000	2	15.147.652.000	2	15.669.333.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	14	14		14		14		14		14			
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.475.000.000		2.525.340.000		2.589.431.000		2.659.836.000		2.751.439.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	14	14	2.475.000.000	14	2.525.340.000	14	2.589.431.000	14	2.659.836.000	14	2.751.439.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				11.620.000.000		11.856.350.000		12.157.262.000		12.487.816.000		12.917.894.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	2	11.620.000.000	2	11.856.350.000	2	12.157.262.000	2	12.487.816.000	2	12.917.894.000		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.904.000		123.362.000		126.491.000		129.929.000		134.402.000		
Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan, sumber daya keperawatan dan keselamatan pasien	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	110	120.904.000	110	123.362.000	110	126.491.000	110	129.929.000	110	134.402.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	40		40		40		40		40			
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				35.904.000		36.634.000		37.563.000		38.584.000		39.912.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2	35.904.000	2	36.634.000	2	37.563.000	2	38.584.000	2	39.912.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				15.000.000		15.305.000		15.693.000		16.119.000		16.674.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	110	15.000.000	110	15.305.000	110	15.693.000	110	16.119.000	110	16.674.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				70.000.000		71.423.000		73.235.000		75.226.000		77.816.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	40	70.000.000	40	71.423.000	40	73.235.000	40	75.226.000	40	77.816.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				195.000.000		198.966.000		204.015.000		209.562.000		216.779.000		
Meningkatnya kinerja pelayanan sistem informasi kesehatan RS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	198.966.000	1	204.015.000	1	209.562.000	1	216.779.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				195.000.000		198.966.000		204.015.000		209.562.000		216.779.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	198.966.000	1	204.015.000	1	209.562.000	1	216.779.000		

Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				26,082,350,614.00		26,612,865,625.00		27,288,300,155.00		28,030,269,036.00		28,995,631,502.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,146,046,000.00		22,596,496,575.00		23,169,995,658.00		23,799,987,840.00		24,619,659,421.00		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama				-		-		-		-		-	1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	86.82	86.90		86.95		87		87.05		87.10		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,940,000.00		6,060,820.00		6,214,643.00		6,383,619.00		6,603,471.00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	2	5,940,000.00	2	6,060,820.00	2	6,214,643.00	2	6,383,619.00	2	6,603,471.00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5,940,000.00		6,060,820.00		6,214,643.00		6,383,619.00		6,603,471.00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	2	5,940,000.00	2	6,060,820.00	2	6,214,643.00	2	6,383,619.00	2	6,603,471.00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,132,026,000.00		3,195,731,409.00		3,276,839,072.00		3,365,936,326.00		3,481,859,174.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,125,076,000.00	12	3,188,640,046.00	12	3,269,567,730.00	12	3,358,467,277.00	12	3,474,132,890.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	7	6,950,000.00	7	7,091,363.00	7	7,271,342.00	7	7,469,049.00	7	7,726,284.00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3,125,076,000.00		3,188,640,046.00		3,269,567,730.00		3,358,467,277.00		3,474,132,890.00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,125,076,000.00	12	3,188,640,046.00	12	3,269,567,730.00	12	3,358,467,277.00	12	3,474,132,890.00		
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6,950,000.00		7,091,363.00		7,271,342.00		7,469,049.00		7,726,284.00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	7	6,950,000.00	7	7,091,363.00	7	7,271,342.00	7	7,469,049.00	7	7,726,284.00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,000,000.00		5,101,698.00		5,231,180.00		5,373,418.00		5,558,476.00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	7	5,000,000.00	7	5,101,698.00	7	5,231,180.00	7	5,373,418.00	7	5,558,476.00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5,000,000.00		5,101,698.00		5,231,180.00		5,373,418.00		5,558,476.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	7	5,000,000.00	1	5,101,698.00	1	5,231,180.00	1	5,373,418.00	1	5,558,476.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				19,000,000,000.00		19,386,460,000.00		19,878,488,355.00		20,418,984,453.00		21,122,214,278.00		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	19,000,000,000.00	1	19,386,460,000.00	1	19,878,488,355.00	1	20,418,984,453.00	1	21,122,214,278.00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				19,000,000,000.00		19,386,460,000.00		19,878,488,355.00		20,418,984,453.00		21,122,214,278.00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	19,000,000,000.00	1	19,386,460,000	1	19,878,488,355	1	20,418,984,453	1	21,122,214,278		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3,936,304,614.00		4,016,369,050.00		4,118,304,497.00		4,230,281,196.00		4,375,972,081.00		
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama													1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama	
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	92.00	93.00		93.50		94.00		94.50		95.00		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,926,304,614.00		4,006,165,650.00		4,107,842,134.00		4,219,534,361.00		4,364,855,125.00		
Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24	234	200,000,000.00	239	204,068,000.00	244	209,247,246.00	249	214,936,678.00	254	222,339,098.00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	2	3,726,304,614.00	2	3,802,097,650.00	2	3,898,594,888.00	2	4,004,597,683.00	2	4,142,516,027.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				200,000,000.00		204,068,000.00		209,247,246.00		214,936,678.00		222,339,098.00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24	234	200,000,000.00	239	204,068,000.00	244	209,247,246.00	249	214,936,678.00	254	222,339,098.00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3,726,304,614.00		3,802,097,650.00		3,898,594,888.00		4,004,597,683.00		4,142,516,027.00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	2	3,726,304,614.00	2	3,802,097,650.00	2	3,898,594,888.00	2	4,004,597,683.00	2	4,142,516,027.00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000.00		10,203,400.00		10,462,363.00		10,746,835.00		11,116,956.00		
Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40	30	10,000,000.00	30	10,203,400.00	30	10,462,363.00	30	10,746,835.00	30	11,116,956.00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10,000,000.00		10,203,400.00		10,462,363.00		10,746,835.00		11,116,956.00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40	30	10,000,000.00	30	10,203,400.00	30	10,462,363.00	30	10,746,835.00	30	11,116,956.00		

4.2 Program Prioritas Kesehatan

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih.

Dari delapan program strategis Wali Kota salah satunya adalah "Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan: Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat, Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan Satu Kampung Satu Bidan", Dinas Kesehatan menyelaraskan dengan indikator program yang relevan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut program prioritas yang diampu oleh Dinas Kesehatan

Tabel 4. 7 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
1.	Satu Kampung Satu Bidan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RS Pratama
				1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Kota Yogyakarta
				1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
3.	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah mengatur prinsip, kriteria, dan tata cara penetapan indikator kinerja, termasuk keterkaitan antara IKU dan IKK. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mengatur bahwa indikator kinerja, baik IKU maupun IKK, digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis Dinas Kesehatan selama periode rencana strategis. IKU ditetapkan untuk memastikan bahwa arah pembangunan kesehatan daerah selaras dengan kebijakan nasional, prioritas pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat.

IKU menjadi acuan dalam pengukuran kinerja secara berkelanjutan, baik untuk menilai efektivitas program maupun untuk memastikan bahwa hasil pembangunan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Penetapan IKU dilakukan melalui proses analisis terhadap visi, misi, dan tujuan strategis, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan nasional (RPJMN), RPJMD, *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta regulasi dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang kesehatan.

Setiap indikator dalam IKU Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dirumuskan dengan memperhatikan prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga indikator yang tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan realistis terkait capaian pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta yang menggambarkan perubahan kondisi kesehatan masyarakat, dan indikator manfaat (*benefit*) yang menunjukkan dampak positif dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

IKU juga berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena hasil pengukuran IKU menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta evaluasi oleh pihak eksternal. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian IKU mencerminkan kualitas perencanaan, pengelolaan program, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selama periode Renstra 2025-2029

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
1.	Prevalensi Balita Stunting	Persentase	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,02	
2.	Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun	Indeks	0,987	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979	0,981	
3.	Angka Kematian Ibu	Angka	93,11	93,1	93,09	93,08	93,07	93,06	93,06	
4.	Angka Kematian Bayi	Angka	9,78	9,76	9,74	9,72	9,7	9,68	9,66	
5.	Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	
7.	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	
8.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Predikat	AA	A	A	A	A	A	A	
9.	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran perangkat daerah secara lebih spesifik. Jika IKU berfungsi sebagai indikator hasil utama (*outcome*) yang bersifat strategis, maka IKK merupakan indikator turunan yang lebih teknis dan operasional, yang mengukur kinerja pada level sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan.

Penetapan IKK mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RPJMD, serta standar dan pedoman kinerja yang berlaku di sektor kesehatan. IKK Dinas Kesehatan disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga arah pembangunan kesehatan di daerah dapat terukur secara jelas.

Fungsi utama IKK meliputi:

1. Mengukur capaian sasaran strategis secara operasional yang telah diturunkan dari IKU.
2. Memonitor kinerja tahunan perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menjadi dasar evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan pengambilan keputusan.
4. Memastikan keselarasan antara target dan realisasi kinerja pada semua tingkatan.
5. Mempermudah proses pelaporan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maupun laporan internal lainnya.

Dengan adanya IKK, Dinas Kesehatan dapat mengukur kinerja secara komprehensif, mulai dari capaian strategis yang luas hingga kinerja teknis pada unit kerja, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan lebih terarah, efektif, dan akuntabel.

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Rasio	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Rumah Sakit Pratama Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bersama dalam mewujudkan pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029, RPJMD Daerah dan bersifat indikatif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dalam kerangka transformasi sistem kesehatan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja utama yang menjadi komitmen seluruh unit pelaksana kesehatan di Kota Yogyakarta. Penyusunan secara terintegrasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, dan RS Pratama Kota Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Menguatkan kolaborasi dan sinergi layanan kesehatan primer dan rujukan, sehingga tercipta jejaring layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar sumber daya kesehatan, baik SDM, sarana prasarana, maupun pembiayaan, dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Mendukung pencapaian target indikator pembangunan kesehatan daerah, termasuk penurunan angka stunting, peningkatan Universal Health Coverage (UHC), pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi, baik di lingkup Dinas Kesehatan maupun rumah sakit daerah, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.

Renstra Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama Kota Yogyakarta ini sekaligus menjadi instrumen manajerial dalam memastikan kesinambungan pembangunan kesehatan di daerah. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan tercapai keselarasan antara pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan perorangan (individual health services) yang menjadi tugas rumah sakit.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen, integritas, serta kerja sama seluruh pihak—baik pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan tekad dan sinergi bersama, diharapkan visi “Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” dapat diwujudkan secara nyata di periode 2025–2029.

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, **LESTARI, DAN BERKEADABAN"**

PERIODE TAHUN
2025-2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2025-2029

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPKP untuk 5 tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPUPKP Tahun 2020-2024, analisa terhadap pendapat pemangku kepentingan serta analisa terhadap permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kota Yogyakarta. Renstra DPUPKP merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan jangka menengah. Penyusunan Rencana Strategis merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 15 September 2025

Umi Akhsanti, M.T.

NIP. 197209261998032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
BAB I **6**
PENDAHULUAN **6**
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II **11**
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DAERAH **11**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 11
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi 11
2.1.1.2 Susunan Organisasi 11
2.1.1.3 Ketugasan Unit Organisasi 12
2.1.1.4 Struktur Organisasi 19
2.1.1.5 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah 19
2.1.1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 20
2.1.1.7 Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah 21
2.1.1.8 Hasil Evaluasi Renstra Periode Sebelumnya (Renstra 2020-2024) 21
2.1.1.9 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.1.1.10 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 25
2.1.1.11 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 26
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 26
2.2.1 Identifikasi Permasalahan 26
2.2.2 Identifikasi Isu Strategis 28
BAB III **33**
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **33**
3.1 Tujuan Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 33
3.2 Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 33
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP 2025-2029 36
3.4. Pentahapan Rencana Strategis DPUPKP 2025-2029 36
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 40
BAB IV **43**
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **43**
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 43
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 75
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 79
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 80
BAB V **83**
PENUTUP **83**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan..... 19
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan..... 20
Tabel 2.3 Aset Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 20
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Belanja DPUPKP Tahun 2025.....21
Tabel 2.5 Capaian Kinerja pada Renstra Periode Sebelumnya.....22
Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 29
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... 34
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD.....37
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra DPUPKP..... 41
Tabel 4.2 Penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....44
Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta..... 64
Tabel 4.4 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....75
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....80
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci.....81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPUPKP..... 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/PUPR dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai DPUPKP beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan

dan sasaran secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 2025-2029
c. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
d. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu 5 tahun.
f. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
g. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Memuat secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya. Review kembali faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta 2025-2029
Memuat uraian tentang kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3.2. Sasaran Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta 2025-2029
Memuat target hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan dan realistis dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029
Memuat uraian strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPUPKP.

3.4. Pentahapan Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029
Memuat tabel dan uraian pentahapan pada pelaksanaan Renstra DPUPKP selama 5 tahun periode.

3.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029
Memuat arah kebijakan DPUPKP dalam pelaksanaan Renstra 2025-2029 yang berdasarkan arah kebijakan RPJMD kota Yogyakarta, secara rinci akan dijabarkan dalam bentuk tabel.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam bentuk tabel secara rinci untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Memuat uraian secara rinci kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang secara efektif untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan program strategis Wali Kota.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama
Memuat uraian target keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dilengkapi baseline tahun sebelumnya yang dijabarkan dalam tabel.

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Memuat uraian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang terukur melalui Indikator kinerja Kunci (IKK) dan dilengkapi baseline tahun sebelumnya yang dijabarkan dalam tabel.

BAB V Penutup

Memuat narasi yang meringkas isi dari Renstra DPUPKP 2025-2029 yang meliputi kesimpulan-kesimpulan penting secara substansial.

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Penataan Bangunan;
d. Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Bidang Jalan dan Jembatan;
g. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
h. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.1.3 Ketugasan Unit Organisasi

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
6. pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
8. pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
10. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
11. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
14. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
15. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
21. dengan bidang tugas Dinas.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;

4. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang;
5. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
8. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
9. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
11. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memelakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
4. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
5. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
6. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
7. penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
8. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
9. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
11. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
12. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;

13. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
14. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
15. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
3. penatausahaan keuangan Dinas;
4. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
5. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas
6. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
7. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
8. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
10. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

III. Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
6. pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;

8. pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
10. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
11. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
14. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
15. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

IV. Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian bangunan;
5. pengendalian dan pengawasan bangunan;
6. penilaian kelaikan bangunan gedung;
7. pengawasan bangunan dan bangunan gedung yang berizin;
8. pendataan bangunan gedung;
9. pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
10. pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengendalian bangunan gedung;
11. penyiapan bahan penetapan retribusi perizinan dan/atau non perizinan bangunan gedung
12. melakukan penyiapan bahan keputusan keringanan pembayaran retribusi perizinan dan/atau non perizinan baunan gedung;
13. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen perizinan dan/atau non perizinan bangunan gedung;

14. pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;
15. pengawasan usaha jasa konstruksi;
16. fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga terampil konstruksi;
17. pengelolaan sistem informasi manajemen jasa konstruksi;
18. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang jasa konstruksi;
19. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
20. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
24. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

V. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penataan perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik;
5. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;
6. pembinaan sistem penyediaan air minum yang dikelola perusahaan daerah air minum;
7. penataan perumahan dan permukiman;
8. pembinaan infrastruktur perumahan;
9. penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
10. perbaikan rumah tidak layak huni;
11. perencanaan pencegahan lingkungan permukiman kumuh;
12. pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;

13. pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersumber dari Pendanaan Keistimewaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
14. pengembangan, pembangunan, dan pembinaan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat;
15. pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman;
16. penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan tempat pemakaman, pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;
17. pembinaan dan pengawasan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;
18. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
19. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

VI. Bidang Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan jalan dan jembatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
4. penyelenggaraan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
5. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang jalan dan jembatan;
7. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Jalan dan Jembatan;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Jalan dan Jembatan;

10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

VII. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya air dan drainase;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
4. peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
5. pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder;
6. pembangunan dan peningkatan sistem drainase;
7. pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang sumber daya air dan drainase;
8. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
9. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
10. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase;
11. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan dibidang sumber daya air dan drainase;
12. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
13. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.1.1.4 Struktur Organisasi

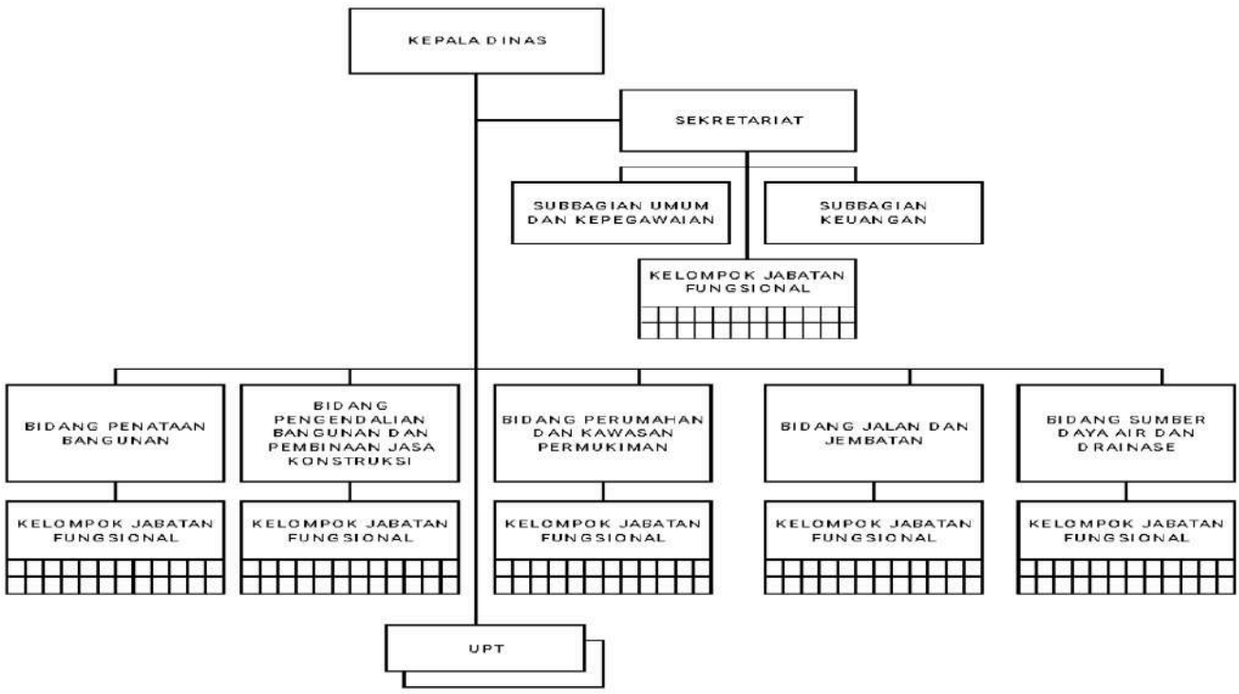

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPUPKP

2.1.1.5 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil, 7 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 38 Penyedia Jasa Layanan Orang Perseorangan (PJLOP) pada masing- masing unit kerja (Sekretariat, Bidang dan UPT) Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Formasi
A.	Jabatan Struktural	
	Kepala Dinas	1 orang
	Sekretaris	1 orang
	Kepala Bidang	5 orang
	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	1 orang
	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	1 orang
	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	1 orang
	Kepala Bidang Penataan Bangunan	1 orang

No	Jabatan	Formasi
	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 orang
	Kepala UPT	3 orang
	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah	1 orang
	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum	1 orang
	Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa	1 orang
	Kasubbag TU	3 orang
	Kasubbag TU UPT Pengelolaan Air Limbah	1 orang
	Kasubbag TU UPT Penerangan Jalan Umum	1 orang
	Kasubbag TU UPT Pengelolaan Rusunawa	1 orang
	Kasubbag	2 orang
	Kasubbag Keuangan	1 orang
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 orang
B.	Jabatan Fungsional	20 orang
C.	Jabatan Pelaksana	54 orang
D.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7 orang
E.	Penyedia Jasa Layanan Orang Perseorangan (PJLOP)	38 orang
Jumlah		134 orang

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Kualifikasi				
		II	III	IV	Staff	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA/ SMK	SMP
PNS														
1	Jumlah	1	6	8	74	11	49	28	1	16	29	18	21	5

2.1.1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Guna Mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Aset Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis	Jumlah Barang
1	Kendaraan Dinas Jabatan	1

No	Jenis	Jumlah Barang
2	Kendaraan Dinas Lapangan	87
3	Perangkat Komputer	90
4	Perangkat Pencetak	45
5	Perangkat Pendingin Ruangan	50

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk

1. Pendukung operasional kegiatan pemeliharaan DPUPKP.
2. Pendukung operasional kegiatan perbaikan dalam pelayanan aduan masyarakat.
3. Fasilitas informasi dan aduan.
4. Fasilitas ruang rapat.
5. Ruang arsip.

2.1.1.7 Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pendanaan direncanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta memanfaatkan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, setiap kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Belanja DPUPKP Tahun 2025

No	Uraian	Murni		Pergeseran I		Pergeseran III	
		Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	13,088,126,850	6.27	13,088,126,850	7.46	13,088,126,850	7.26
2.	Belanja Barang dan Jasa	77,342,514,361	37.07	77,342,514,361	44.11	79,631,104,121	44.19
3.	Belanja Modal	118,220,345,100	56.66	84,908,327,100	48.43	87,479,905,050	48.55
Jumlah Anggaran		208,650,986,311	100	175,338,968,311	100	180,199,136,021	100

2.1.1.8 Hasil Evaluasi Renstra Periode Sebelumnya (Renstra 2020-2024)

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan target Renstra periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasar Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Capaian Kinerja pada Renstra Periode Sebelumnya

Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik (Review 2024)**	-	100,58%	100,59%	100,34%	99,99%
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	107,88%	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase pemenuhan drainase kondisi baik (Review 2024)**	-	100,02%	99,60%	100,80%	100,05%
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	99,87%	-	-	-	-
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Review 2023)**	-	100,04%	100,18%	100,03%	100,14%
		Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (Review 2023)	-	-	-	100,00%	100,00%
	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	100,00%	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan**	-	108,62%	114,45%	104,05%	101,20%
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	100,15%	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi (Review 2024)**	-	-	-	111,92%	140,59%
		Prosentase tenaga kerja terampil	-	142,09%	100,16%	-	-
		Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	-	133,33%	140,33%	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	**Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan (Review 2023)**	-	-	-	101,04%	100,10%

Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
	JALAN (LLAJ)						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	-	101,65%	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	99,69%	-	100,76%	-	-
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan (Review 2023)**	-	-	-	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase pelayanan SPALD-S akses layak (Review 2024)**	-	-	-	101,12%	106,06%
		Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	-	102,62%	103,93%	-	-
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman (Review 2023)	-	-	-	102,19%	113,07%
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	-	100%	100%	-	-
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (Review 2024)	-	-	-	101,26%	101,76%
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	-	101,66%	100,92%	-	-
	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	100%	-	-	-	-
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik (Review 2023)	-	-	-	100,73%	101,26%
		Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	-	100%	99,23%	-	-

Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	100%	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	-	-	-	100,00%	100,00%
		Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun (Review 2024)	-	110%	106,71%	113,42%	115,34%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani (Review 2024)	-	110,83%	97,89%	143,50%	144,75%
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.1.1.9 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum, serta perumahan dan permukiman yang layak huni. Oleh karena itu, kelompok sasaran yang dilayani mencakup semua lapisan masyarakat, baik individu, keluarga, maupun komunitas, yang membutuhkan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai. Secara lebih spesifik, pelayanan DPUPKP Kota Yogyakarta diarahkan kepada:

1. **Masyarakat umum**: Semua warga Kota Yogyakarta yang mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur publik lainnya.
2. **Masyarakat Berpenghasilan Rendah**: Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam program peningkatan kualitas perumahan, seperti penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan rumah susun.
3. **Kelompok Swadaya Masyarakat**: KSM seringkali menjadi mitra dalam program-program penataan permukiman, terutama di kawasan-kawasan kumuh, untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.
4. **Pengembang dan pelaku usaha**: Sektor swasta juga merupakan kelompok sasaran dalam hal perizinan, pengawasan, dan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan.
5. **Instansi pemerintah lainnya**: DPUPKP juga berkoordinasi dan melayani kebutuhan infrastruktur dari perangkat daerah lain di Kota Yogyakarta.

2.1.1.10 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Pada sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jalan berfungsi baik, dukungan mitra perangkat daerah antara lain berasal dari Dinas Kominfo melalui penataan kabel udara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penyediaan vegetasi atau perindang jalan, PDAM melalui pengembalian kondisi jalan pasca pemeliharaan dan pembangunan jaringan air minum, serta Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pembuatan marka jalan dan penyelenggaraan lalu lintas. Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik, diperlukan dukungan DLH dalam pengendalian sampah di sungai maupun saluran irigasi, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) dalam penyusunan dokumen KKPR.

Adapun untuk sasaran meningkatnya pemenuhan bangunan gedung dengan kondisi baik, sinergi diwujudkan melalui peran OPD lain dan wilayah dalam rehabilitasi maupun pemeliharaan gedung kantor non-struktur, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) dalam pemenuhan bangunan fasilitas pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam penyediaan fasilitas kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinan PBG dan SLF. Pada sasaran meningkatnya akses sanitasi aman dan pelayanan air minum, dukungan

Bappeda menjadi penting dalam penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sanitasi maupun air minum.

Sementara itu, sasaran meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan memerlukan dukungan DLH terkait penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penyelesaian indikator kumuh dalam aspek persampahan, Dispertaru dalam aspek pertanahan khususnya di kawasan Sultan Ground, serta dukungan wilayah dalam peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan infrastruktur permukiman lainnya sebagai bagian dari upaya pengentasan kawasan kumuh. Akhirnya, pada sasaran meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik, dukungan Bappeda diperlukan dalam perumusan regulasi maupun kebijakan pengembangan perumahan yang berkelanjutan.

Dengan keterpaduan lintas perangkat daerah dan mitra strategis tersebut, kinerja pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan permukiman dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.1.11 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Upaya pencapaian kinerja perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sinergi berbagai pemangku kepentingan, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam konteks peningkatan akses sanitasi aman dan pelayanan air minum, keberadaan PDAM Tirtamarta menjadi faktor kunci yang mendukung pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun kewenangan teknis penyediaan layanan air minum berada pada PDAM Tirtamarta sebagai operator, DPUPKP berperan strategis dalam melakukan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kelembagaan penyedia layanan agar penyelenggaraan layanan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Dengan pola pembagian peran tersebut, kinerja penyediaan layanan air minum aman dapat diwujudkan secara lebih terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tidak lepas dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang semakin beragam. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul dari keterbatasan infrastruktur dasar, tetapi juga dari dinamika lingkungan, sosial, ekonomi, serta tuntutan terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan yang semakin tinggi.

Dalam rangka penyusunan Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi pada setiap bidang kewenangan. Identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan. Secara garis besar, permasalahan dan isu yang dihadapi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase

a. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada

saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi sehingga kapasitas saluran menurun.

b. Adanya potensi bencana pada talud sungai yang curam akibat curah hujan tinggi serta usia konstruksi talud yang sudah lama.
c. Adanya limpahan air hujan dari daerah lain sehingga saluran air hujan melebihi kapasitas dan mengakibatkan adanya genangan di beberapa titik lokasi.

2. Bidang Jalan Dan Jembatan

a. Kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
b. Bangunan Pelengkap Jalan berupa trotoar juga masih banyak memerlukan rehabilitasi khususnya fasilitasi pengguna jalan disabilitas.

3. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

a. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2024 masih terdapat sisa luas kumuh sebesar 57,14 ha yang belum tertangani.
b. Pemenuhan Rumah Layak Huni masih menyisakan RTLH belum tertangani sebanyak 1627 unit di akhir tahun 2024.
c. Penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk menyelesaikan backlog perumahan, terkendala keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta.
d. Hingga tahun 2024, akses sanitasi aman di Kota Yogyakarta baru mencapai 43,67% dari total rumah tangga. Artinya, lebih dari separuh rumah tangga belum memiliki akses ke sanitasi aman.
e. Beberapa kawasan permukiman kumuh mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, termasuk sanitasi yang buruk, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

4. Bidang Pengendalian Bangunan Dan Jasa Konstruksi

a. Pelayananan PBG dan SLF belum maksimal dikarenakan terkendala dokumen permohonan dari masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga dilakukan koreksi dengan diberikan catatan yang selanjutnya akan dikembalikan ke pemohon agar dokumen dapat sesuai dengan persyaratan.
b. Badan usaha jasa konstruksi (penyedia jasa) belum sepenuhnya menerapkan standar K3 di lokasi kerja dikarenakan belum adanya aturan dan sanksi yang tegas dari DPUPKP.

5. Bidang Penataan Bangunan Gedung

a. Keterbatasan luas lahan eksisting gedung pemerintah, yang mengakibatkan pengembangan gedung ke arah vertikal. Hal ini berdampak pada pelayanan inklusi yang tidak dapat optimal.
b. Belum terpenuhinya kualitas gedung pemerintah sesuai standar inklusi dikarenakan keterbatasan anggaran. Sebagian besar anggaran fisik nilainya di bawah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Desain (DED) yang sudah dikerjakan.

6. UPT Penerangan Jalan Umum

a. Masih adanya titik PJU yang belum menggunakan lampu LED ramah lingkungan.

7. UPT Pengelolaan Rusunawa

a. Banyaknya pemeliharaan yang harus dilakukan akibat usia bangunan yang sudah lama dan beberapa bagian sudah rusak.

8. UPT Pengelolaan Air Limbah

a. Masih banyaknya saluran air limbah yang melalui persil masyarakat sehingga terdapat kendala dalam melakukan pemeliharaan

2.2.2 Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan dinamika global, nasional, dan regional yang berpotensi mempengaruhi perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perumusan isu strategis didasarkan pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti RPJMN 2025–2029, Renstra K/L, laporan resmi lembaga pemerintah maupun internasional, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029, maupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Darah. Rumusan isu strategis daerah kemudian disimpulkan dari permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan dinamis yang relevan, serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder, Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder. 3. Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta. 4. Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai	Hingga tahun 2024, akses sanitasi aman di Kota Yogyakarta baru mencapai 43,67% dari total rumah tangga. Artinya, lebih dari separuh rumah tangga belum memiliki akses ke sanitasi aman.	1. Pengelolaan Persampahan dan limbah belum optimal 2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah 3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik 4. Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi 5. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya	1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota 2.Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 3. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan 2. Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan 3.Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana	1. Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia 2. Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional 3. Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	1. Pengelolaan limbah rumah tangga yang belum memadai berpotensi menurunkan kualitas air tanah dan mencemari lingkungan.
	Beberapa kawasan permukiman kumuh mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, termasuk sanitasi yang buruk, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.					
	Masih banyaknya saluran air limbah yang melalui persil masyarakat sehingga terdapat kendala dalam melakukan pemeliharaan					
	Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2024 masih terdapat sisa luas kumuh sebesar 57,14 ha yang belum tertangani.					2. Pesatnya laju urbanisasi menimbulkan tekanan serius pada ketersediaan hunian yang berpotensi memperluas permukiman kumuh dan
	Pemenuhan Rumah Layak Huni masih menyisakan RTLH belum tertangani sebanyak 1627 unit di akhir tahun 2024.					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
secara terbatas. 5. Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan SPAL domestik. 6. Pengembangan jaringan primer dan drainase berkonsep infrastruktur hijau di Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong 7. Pengembangan kawasan khusus pedestrian di Koridor jalan Malioboro dan semi pedestrian di Koridor Jalan Urip Sumoharjo 8. Pengembangan	Penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk menyelesaikan backlog perumahan, terkendala keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta.					menurunkan kualitas hidup perkotaan.
	Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi sehingga kapasitas saluran menurun.					3. Pembangunan kota yang masif di Provinsi DIY dan Pelampauan intensitas pemanfaatan ruang menimbulkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya risiko banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.
	Adanya limpahan air hujan dari daerah lain sehingga saluran air hujan melebihi kapasitas dan mengakibatkan adanya genangan di beberapa titik lokasi.					
	Pelayananan PBG dan SLF masih belum maksimal.					
	Adanya potensi bencana pada talud sungai yang curam akibat curah hujan tinggi serta usia konstruksi talud yang					4. Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan penyediaan street furniture.	sudah lama.					Kota yang Berkelanjutan
	Kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.					
	Bangunan Pelengkap Jalan berupa trotoar juga masih banyak memerlukan rehabilitasi khususnya fasilitasi pengguna jalan disabilitas.					
	Badan usaha jasa konstruksi (penyedia jasa) belum sepenuhnya menerapkan standar K3 di lokasi kerja dikarenakan belum adanya aturan dan sanksi yang tegas dari DPUPKP					
	Keterbatasan luas lahan eksisting gedung pemerintah, yang mengakibatkan pengembangan gedung ke arah vertikal. Hal ini berdampak pada pelayanan inklusi yang tidak dapat optimal.					
	Masih adanya titik PJU yang belum menggunakan lampu LED ramah lingkungan					
	Banyaknya pemeliharaan yang harus dilakukan akibat usia bangunan rusun yang sudah lama.					
	Masih banyaknya kabel udara yang tidak tertata sehingga dapat membahayakan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengguna jalan dan mengganggu estetika lanskap kota					

Dengan melihat kondisi pembangunan yang ada, isu lingkungan dinamis yang relevan serta permasalahan yang dihadapi maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis perangkat daerah berikut:

1. Pengelolaan limbah rumah tangga yang belum memadai berpotensi menurunkan kualitas air tanah dan mencemari lingkungan.
2. Pesatnya laju urbanisasi menimbulkan tekanan serius pada ketersediaan hunian yang berpotensi memperluas permukiman kumuh dan menurunkan kualitas hidup perkotaan.
3. Pembangunan kota yang masif di Provinsi DIY dan Pelampauan intensitas pemanfaatan ruang menimbulkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya risiko banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.
4. Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan perkotaan yang dihadapi DPUPKP, baik dari aspek infrastruktur, lingkungan, maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu, hasil identifikasi ini perlu diarahkan pada perumusan isu-isu strategis yang lebih fokus dan terukur, yang akan menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan perangkat daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029. Tujuan tersebut dirumuskan sebagai arah strategis untuk mencapai visi, melaksanakan misi, serta menjawab isu strategis dan tantangan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman. Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program serta menjadi pondasi utama dalam merancang strategi pembangunan, sekaligus menunjukkan hasil yang diharapkan dari berbagai program yang akan dijalankan.

Dengan demikian, dirumuskan Tujuan Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 yaitu “Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.”

3.2 Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Sasaran Renstra DPUPKP 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik;
2. Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kondisi Baik;
3. Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik;
4. Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Akses Aman;
5. Meningkatnya Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan;
6. Meningkatnya Perumahan Layak Huni Dan Dalam Kondisi Baik; dan
7. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dirumuskan menjadi capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja tertinggi sebagai dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan dalam Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini juga dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Lebih lanjut terkait teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana	1. Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman		Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah	77,54%	77,98%	78,43%	78,89%	79,35%	79,81%	
			Indeks prasarana perumahan dan permukiman	92,38	94,17	95,96	97,75	99,91	99,94	
		1.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	86,18%	86,58%	86,98%	87,38%	87,77%	88,16%	
		1.2 Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik	72,62%	73,10%	73,58%	74,06%	74,54%	75,02%	
		1.3 Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik	93,57%	94,07%	94,65%	95,24%	95,86%	96,44%	
		1.4 Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Persentase air minum dan sanitasi akses aman	49,66%	50,07%	50,48%	50,89%	51,30%	51,71%	
		1.5. Meningkatnya	Persentase	89,11%	91,67%	94,22%	96,78%	99,87%	99,91%	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		permukiman layak huni dan berkelanjutan	permukiman layak huni dan berkelanjutan							
		1.6. Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
		1.7. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PUPKP	A (87,59-90)	A (87,63-90)	A (87,67-90)	A (87,71-90)	A (87,76-90)	A (87,80-90)	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus, serta penentuan program/kegiatan dan sub-kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPUPKP.

Berdasarkan tugas dan fungsi DPUPKP, serta memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan isu strategis yang telah terpetakan, serta berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, maka strategi pembangunan jangka menengah DPUPKP dirumuskan melalui penetapan target kinerja yang terukur bagi setiap tujuan dan sasaran. Target tersebut menjadi dasar arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

Selanjutnya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dipetakan ke dalam pentahapan pembangunan selama lima tahun. Setiap tahapan diarahkan untuk menjamin konsistensi, kesinambungan, dan fokus kebijakan, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak hanya bersifat tahunan, tetapi juga berorientasi jangka menengah. Dengan demikian, kebijakan, program, dan kegiatan DPUPKP 2025–2029 akan lebih terarah, sistematis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan permukiman Kota Yogyakarta.

3.4. Pentahapan Rencana Strategis DPUPKP 2025-2029

Tahapan pembangunan dalam Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 juga disusun sebagai turunan dari RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029, yang merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045. Periode ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sebagai landasan akselerasi pada tahap berikutnya, sekaligus mendukung visi kota “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Tahapan tersebut dirancang sebagai kerangka waktu yang terstruktur untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan fokus tematik yang selaras dengan lokus prioritas RPJMD. Dengan demikian, setiap langkah strategis yang diambil tidak hanya menguatkan fungsi wilayah prioritas, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Penetapan fokus tematik setiap tahun menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, penjadwalan kegiatan, dan penetapan indikator keberhasilan, sehingga seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Seluruh program DPUPKP diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, penataan permukiman yang layak huni, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola jasa konstruksi. Integrasi program dan kegiatan dilakukan berdasarkan lokus prioritas RPJMD, yang meliputi Kawasan Sumbu Filosofi sebagai pusat budaya dan pariwisata dengan penataan infrastruktur dan tata ruang berbasis pelestarian; Pengembangan Kawasan Jogja Selatan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan melalui penguatan aksesibilitas, infrastruktur pendukung pariwisata, dan penataan lingkungan; serta Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong dengan pola pemugaran maupun peremajaan kawasan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, dan layak huni. Dalam pelaksanaannya, Renstra DPUPKP akan dilaksanakan dalam 5 tahapan selama periode tahun 2025-2029 yang terjabarkan pada tabel dan narasi di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	**Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik**	**Akselerasi Pembangunan Prioritas**	**Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan**	**Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan**
Pemeliharaan berkala dan perbaikan infrastruktur eksisting sebagai fondasi pelayanan publik	Perluasan cakupan dan kualitas infrastruktur perkotaan.	Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang berdampak langsung pada lokus-lokus prioritas.	Pembangunan akan difokuskan pada integrasi antar sektor guna mendukung keberlanjutan program pembangunan.	Penyelesaian target-target pembangunan infrastruktur dan konsolidasi akan hasil yang sudah dicapai.
Pemeliharaan akses di sekitar kawasan Sumbu Filosofis dan Jogja Selatan sebagai kawasan prioritas.	Pengembangan kualitas jalan sebagai aksesibilitas ke kawasan prioritas.	Peningkatan jalan dan infrastruktur pendukung jalan terutama koridor wisata guna mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan ke arah kawasan prioritas	Pemeliharaan jalan berkala dan penataan koridor pedestrian di area yang saling menghubungkan kawasan ekonomi dan pariwisata	Akses kendaraan dan pedestrian antar lokus prioritas RPJMD akan saling terhubung dan terintegrasi
Penguatan sistem drainase dan perlindungan tebing sungai untuk mengantisipasi risiko bencana.	Perluasan pembangunan saluran air hujan terutama di kawasan Jogja Selatan dan Sumbu Filosofi serta meningkatkan perlindungan tebing guna mengantisipasi bencana banjir dan longsor.	Perbaikan dan pembangunan terus dilakukan guna mengantisipasi genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta meningkatkan perlindungan tebing guna mengantisipasi bencana banjir dan longsor.	Saluran air hujan pada ruas jalan protokol juga turut dilakukan pemeliharaan sebagai upaya integrasi drainase dan antisipasi genangan air serta meningkatkan perlindungan tebing guna mengantisipasi bencana banjir dan longsor.	Drainase di kawasan Jogja Selatan, Sumbu Filosofi, pariwisata dan ekonomi terpelihara dengan baik serta meningkatkan perlindungan tebing guna mengantisipasi bencana banjir dan longsor.
Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar	Pembangunan bangunan kantor pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik dan sektor perdagangan.	Pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan dan fasilitas kesehatan guna percepatan pembangunan.	Pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan fasilitas perdagangan guna mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan.	Pembangunan dan rehabilitasi dalam penyelesaian target pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan fasilitas perdagangan guna menyinambungkan pembangunan.

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Perbaikan infrastruktur dasar permukiman sebagai upaya penataan kawasan kumuh dan penyediaan hunian yang lebih layak.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman sebagai upaya penataan kawasan kumuh dan penyediaan hunian yang lebih layak.	Percepatan dalam upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak huni.	Penataan kawasan terus berkelanjutan dan terintegrasi dengan peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	Penyelesaian target-target peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.
Penataan jaringan penerangan jalan umum guna mendukung keamanan dan kenyamanan kota.	Pemerataan penerangan jalan umum terutama di kawasan Jogja Selatan.	Penataan jaringan penerangan jalan umum di kawasan jogja selatan terus dikebut agar masyarakat lebih aman dan nyaman berkegiatan di malam hari.	Kawasan pendukung sumbu filosofi di beberapa jalan kota juga akan dilakukan penataan jaringan penerangan jalan umum guna mengintegrasikan jaringan agar penataan PJU dapat berkelanjutan.	Penataan penerangan jalan umum dalam terutama di kawasan lokus prioritas RPJMD guna mendukung pengembangan kawasan Jogja selatan dan sumbu filosofi.

Tahap I (2025): Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

Pada tahap awal ini, Dinas PUPKP memprioritaskan penguatan fondasi pembangunan, diantaranya melalui pemeliharaan berkala dan perbaikan infrastruktur eksisting sebagai fondasi pelayanan publik. Hal ini mencakup pemeliharaan jalan strategis kota seperti Jalan Sugeng Jeroni dan koridor penting lain yang menjadi akses ke lokus RPJMD seperti Kawasan Sumbu Filosofi dan Kawasan Pengembangan Jogja Selatan, sebagai upaya untuk memastikan kondisi jalan sebagai urat nadi mobilitas dan ekonomi kota tetap optimal. Fasilitas pendidikan juga tidak luput dalam perencanaan tahun 2025 yang akan dilaksanakan di SDN Golo, SDN Gambiran dan SMPN 10 Yogyakarta. Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai juga dilaksanakan, selaras dengan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali), dimulai dari kawasan Pringgokusuman dan Kotabaru. Pembangunan SAH juga dilakukan di sekitar lokus RPJMD, seperti di Jl Langenastran dan Kelurahan Rejowinangun, guna mengantisipasi curah hujan tinggi sehingga akses tetap dapat dilalui dengan baik. Perkuatan tebing sungai juga akan menjadi perhatian DPUPKP dalam pembangunan setiap tahunnya, pembangunan talud akan lebih fokus di 3 sungai besar yang melewati kota Yogyakarta yaitu, sungai Code, Winongo dan Gajah Wong untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam antisipasi kejadian bencana luapan sungai dan atau longsor. Selain itu, direncanakan juga penataan Lampu PJU di kawasan Jogja Selatan secara bertahap.

Tahap II (2026): Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Dengan dasar yang telah dibangun, tahap ini mendorong pada perluasan cakupan dan kualitas infrastruktur perkotaan diantaranya melalui penambahan ruas jalan yang terpelihara, peningkatan aksesibilitas ke kawasan prioritas RPJMD seperti Terminal Giwangan (*transit hub* Kawasan Jogja Selatan) dan koridor perdagangan utama seperti jalan Gambiran dan sekitarnya. Fasilitas pendidikan juga tidak luput dalam perencanaan tahun 2026 yang akan dilaksanakan di SDN Ngabean dan SMPN 14. Penataan kawasan permukiman kumuh juga ditingkatkan meliputi bantaran kawasan sungai Code dan Winongo yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hunian serta layanan dasar di permukiman. Pembangunan SAH juga tidak luput dalam peningkatan akses kawasan Jogja Selatan dan Sumbu Filosofi, seperti yang direncanakan pada Kelurahan Rejowinangun dan Jogokariyan, selain itu juga dilakukan pemeliharaan SAH di beberapa jalan protokol seperti Jl. Kapten Tendean dan Jl. MT Haryono. Penataan PJU juga terus dilanjutkan di kawasan Jogja Selatan sehingga penerangan kota dapat merata.

Tahap III (2027): Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahapan ini merupakan titik tengah dan momentum akselerasi. Memasuki tahap ini, DPUPKP melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada lokus prioritas RPJMD, seperti penataan trotoar koridor wisata yang meliputi Jalan Sultan Agung dan Kusumanegara yang terhubung dengan Sumbu Filosofi dan mengarah ke kawasan terminal Giwangan sebagai *transit hub* kawasan Jogja Selatan, serta pembangunan dan rehabilitasi jembatan Kleringan untuk kelancaran mobilitas tengah kota guna mendukung akses pariwisata menuju Malioboro dan atau Kotabaru. Fasilitas pendidikan juga tidak luput dalam perencanaan tahun 2027 yang akan dilaksanakan di SDN Kintelan 1, SD Pilahan, SMPN 15 dan SMPN 16. Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong juga direncanakan untuk terus dilaksanakan guna mendukung fungsi lindung sekaligus estetika kota dengan tetap memperhatikan kelayakan di permukimannya. Pembangunan SAH juga akan terus dilanjutkan, seperti yang akan dilaksanakan di Jl Persatuan dan Jl Sorogenen untuk dapat menyelesaikan permasalahan apabila ada genangan air yang dapat menghambat

aktivitas masyarakat. Penataan PJU juga terus dilanjutkan di kawasan Jogja Selatan seperti Jl. Ngeksigondo, Jl. Gedongkuning dan Jl. Sisingamangaraja.

Tahap IV (2028): Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pembangunan pada tahap ini diarahkan untuk Integrasi, Efisiensi, dan Keberlanjutan Program. Kegiatan pembangunan difokuskan pada integrasi antar-sektor melalui penataan koridor jalan utama seperti penataan trotoar Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Laksda Adisucipto, pemeliharaan Jl. Mangkuyudan dan Jalan Atmosukarto yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan strategis kota. Pada tahap ini, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, aksesibilitas, dan tata ruang, sejalan dengan pengembangan ekosistem pariwisata Kawasan Jogja Selatan. Fasilitas pendidikan juga tidak luput dalam perencanaan tahun 2028 yang akan dilaksanakan di TKN 4, SDN Randusari, SDN Tamansari 1, SDN Kyai Mojo, SDN Dalem dan SMPN 10. Selain fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan juga akan ditingkatkan kualitasnya melalui revitalisasi Pasar Demangan. Penataan kawasan bantaran sungai juga terus dilanjutkan terutama di bantaran sungai Code. Pembangunan SAH di beberapa jalan protokol juga direncanakan di Jl HOS Cokroaminoto dan Jl Urip Sumoharjo - Jl. Jend. Sudirman sebagai bentuk upaya untuk integrasi drainase dan antisipasi genangan air akibat curah hujan yang tinggi. Penataan PJU juga terus dilakukan guna memeratakan penerangan di malam hari, diantaranya di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Lempuyangan dan Jl Lowanu.

Tahap V (2029): Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap akhir Renstra ini difokuskan pada penyelesaian seluruh target pembangunan dan konsolidasi hasil-hasil yang telah dicapai. Pada tahun akhir periode ini diarahkan pada penyelesaian program strategis seperti pemeliharaan berkala ruas jalan penghubung antar-lokus RPJMD seperti yang akan dilaksanakan pada Jl. Magelang, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl Kapten Tendean dan Jl. Sorogenen serta penataan trotoar Jl. Parangtritis untuk mendukung aktivitas pedestrian di kawasan Jogja Selatan. Fasilitas pendidikan juga tidak luput dalam perencanaan tahun 2029 yang akan dilaksanakan di SDN Golo, SDN Kyai Mojo dan SMPN 2. Selain fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan juga akan ditingkatkan kualitasnya melalui revitalisasi Pasar Legi Wirobrajan. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan, termasuk keberlanjutan pengelolaan kawasan kumuh yang telah ditata dan optimalisasi fungsi infrastruktur di kawasan prioritas RPJMD di bantaran sungai Code, Winongo dan Gajah Wong. Guna memastikan keberlanjutan infrastruktur drainase, pembangunan SAH juga akan dilaksanakan di beberapa lokasi, diantaranya Jl. Bausasran dan Jl. Prof. Herman Yohanes. Selain itu pemeliharaan juga dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di Jl. Bhayangkara, Jl. Letjen Suprapto dan Jl. HOS Cokroaminoto yang akan berkesinambungan dengan pemeliharaan jalannya. Penataan PJU kawasan Jogja Selatan juga masih berlanjut diantaranya akan dilaksanakan di jalan Imogiri Timur - Terminal Giwangan, Jl. Letjen Suprapto dan Jl. Cik Di Tiro.

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan dengan sasaran dan arah kebijakan RPJMD. Selain itu juga untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Perumusannya didasarkan pada isu strategis, potensi, dan permasalahan yang ada, dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, perumahan, kawasan permukiman, serta pelayanan publik yang

berkelanjutan dan merata. Selanjutnya, rincian arah kebijakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra DPUPKP

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kota	- Meningkatkan jalan kota dalam kondisi mantap - Meningkatkan jembatan kota dalam kondisi mantap - Meningkatkan kualitas pelengkap jalan kota	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Meningkatkan kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	- Meningkatkan penggunaan material LED dalam penyediaan perlengkapan jalan	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Meningkatkan sistem drainase kondisi baik	- Mengembangkan dan mengelola sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	
	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	- Meningkatkan mutu bangunan pengaman sungai melalui perbaikan talud yang rusak dan pembangunan talud - Meningkatkan mutu saluran irigasi	
	Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Meningkatkan bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik	- Meningkatkan kualitas bangunan dengan cara perbaikan dan pembangunan gedung pemerintah berdasarkan skala urgensi.	
	Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu	- Meningkatkan percepatan waktu pencermatan oleh Dinas	
	Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi	- Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	
	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	- Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	
	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Memperkuat inovasi dan kerja sama dalam percepatan penyediaan infrastruktur air minum	- Meningkatkan akses pelayanan air minum aman	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Mempercepat penanganan rumah tidak layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	- Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni	
	Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh	- Meningkatkan luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani.	
	Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Meningkatkan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	
	Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Meningkatkan penanganan backlog perumahan	- Meningkatkan pengembangan perumahan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam periode lima tahun mendatang, yaitu Tahun 2025–2029, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan pencapaiannya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berpedoman pada kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, perwujudan program dan kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap melalui pendekatan berbasis prioritas, dengan mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat serta berorientasi pada penataan ruang kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pendanaan direncanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta memanfaatkan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, setiap kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Selanjutnya, rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2025 disusun secara sistematis dalam Matriks Program Lima Tahunan, yang memuat uraian tujuan, sasaran, serta langkah-langkah operasional yang akan ditempuh. Matriks ini menjadi acuan utama dalam memastikan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Penjabaran rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman				Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah (Indeks)		
					Indeks prasarana perumahan dan permukiman (Indeks)		
		1.1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik			Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik (Persentase)		
			1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota		Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terwujudnya jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi mantap (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.1.2. Meningkatnya sistem drainase kondisi baik		Persentase pemenuhan drainase kondisi baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Terwujudnya saluran drainase dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (Persentase)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.1.3. Meningkatnya kualitas lampu		Persentase penerangan jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan		umum ramah lingkungan (Persentase)	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan Ramah Lingkungan	Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		1.2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik			Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik		
			1.2.1. Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik		Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terkelolanya talud sungai dalam kondisi baik	Panjang Talud sungai Kondisi Baik (m')	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dipelihara (KM)	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Terlaksananya saluran irigasi kondisi baik	Panjang saluran irigasi kondisi baik (m')	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
		1.3. Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik			Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik (Persentase)		
			1.3.1. Meningkatnya		Persentase	1.03.08 - PROGRAM	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik		pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Persentase)	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			1.3.2. Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu		Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terwujudnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Terselenggaranya layanan konsultasi teknis permohonan PBG dan SLF	Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik (Persentase)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			1.3.3 Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi		Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi (Persentase)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Teknisi atau Analis yang Dilatih Orang)	Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
		1.4. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman			Persentase air minum dan sanitasi akses aman (Persentase)		
			1.4.1 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM		Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM (Persentase)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggara SPAM yang dibina (Persentase)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.4.2 Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) akses aman		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air	1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Unit)	1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		1.5. Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan			Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan (Persentase)		
			1.5.1 Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani		Persentase permukiman kumuh yang tertangani (Persentase)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase pemenuhan rumah layak huni (Persentase)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah RTLH tertangani (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		1.6. Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik			Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik (Persentase)		
			1.6.1 Meningkatnya pengembangan perumahan		Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program (Persentase)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase rumah	1.04.02 - PROGRAM	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					susun yang dipelihara (Persentase)	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM (Persentase)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan rusunawa	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun (Persentase)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		1.7 Meningkatnya Tata Kelola			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PUPKP (Nilai)		

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPUPKP	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP (Persentase)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP (Persentase)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					(Dokumen)	Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan	1.03.01.2.02.0007 -	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP (Persentase)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPUPKP	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPUPKP (Nilai)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat	

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, penyediaan perumahan dan permukiman layak huni, serta penguatan tata kelola pelayanan publik di bidang pekerjaan umum. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta alokasi pagu indikatif sebagai pedoman pelaksanaan. Uraian rinci mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan ditampilkan pada tabel berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				154.335.936.057,00		147.640.568.938,00		150.643.480.269,00		154.467.092.074,00		158.666.379.589,00		164.130.119.796,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.601.067.967,00		16.811.936.180,00		17.153.879.821,00		17.589.277.206,00		18.067.453.050,00		18.689.613.018,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	17.601.067.967,00	Terkelola dan Terukur	16.498.292.180,00	Terkelola dan Terukur	17.153.879.821,00	Terkelola dan Terukur	17.589.277.206,00	Terkelola dan Terukur	18.067.453.050,00	Terkelola dan Terukur	18.689.613.018,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (nilai)	83.42	83.50		83.60		83.70		83.80		83.90		84.00			
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				465.968.000,00		351.814.500,00		358.970.407,00		368.081.076,00		378.089.200,00		391.110.592,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPUPKP	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP (persentase)	100	100	465.968.000,00	100	351.814.500,00	100	358.970.407,00	100	368.081.076,00	100	378.089.200,00	100	391.110.592,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP (persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.445.000,00		18.855.000,00		19.238.511,00		19.726.784,00		20.263.155,00		20.961.018,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	4	35.445.000,00	4	18.855.000,00	4	19.238.511,00	4	19.726.784,00	4	20.263.155,00	4	20.961.018,00		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.200.000,00		5.600.000,00		5.713.904,00		5.858.923,00		6.018.227,00		6.225.495,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	10.200.000,00	1	5.600.000,00	1	5.713.904,00	1	5.858.923,00	1	6.018.227,00	1	6.225.495,00		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.500.000,00		5.600.000,00		5.713.904,00		5.858.923,00		6.018.227,00		6.225.495,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	1	7.500.000,00	1	5.600.000,00	1	5.713.904,00	1	5.858.923,00	1	6.018.227,00	1	6.225.495,00		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.525.000,00		5.737.500,00		5.854.201,00		6.002.780,00		6.165.996,00		6.378.353,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	4.525.000,00	1	5.737.500,00	1	5.854.201,00	1	6.002.780,00	1	6.165.996,00	1	6.378.353,00		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.950.000,00		4.580.000,00		4.673.157,00		4.791.762,00		4.922.050,00		5.091.565,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1	5.950.000,00	1	4.580.000,00	1	4.673.157,00	1	4.791.762,00	1	4.922.050,00	1	5.091.565,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				402.348.000,00		311.442.000,00		317.776.730,00		325.841.904,00		334.701.545,00		346.228.666,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	6	6	402.348.000,00	6	311.442.000,00	6	317.776.730,00	6	325.841.904,00	6	334.701.545,00	6	346.228.666,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.809.163.800,00		12.620.391.350,00		12.877.078.969,00		13.203.931.148,00		13.562.869.434,00		14.029.891.540,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (nilai)	5	5	13.809.163.800,00	5	12.620.391.350,00	5	12.877.078.969,00	5	13.203.931.148,00	5	13.562.869.434,00	5	14.029.891.540,00		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.696.925.800,00		12.504.267.750,00		12.758.593.414,00		13.082.438.431,00		13.438.073.330,00		13.900.797.457,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	98	98	13.696.925.800,00	98	12.504.267.750,00	98	12.758.593.414,00	98	13.082.438.431,00	98	13.438.073.330,00	98	13.900.797.457,00		
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6.405.000,00		7.137.000,00		7.282.167,00		7.466.988,00		7.670.015,00		7.934.171,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	1	1	6.405.000,00	1	7.137.000,00	1	7.282.167,00	1	7.466.988,00	1	7.670.015,00	1	7.934.171,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.120.000,00		3.120.000,00		3.183.461,00		3.264.257,00		3.353.012,00		3.468.490,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	3.120.000,00	1	3.120.000,00	1	3.183.461,00	1	3.264.257,00	1	3.353.012,00	1	3.468.490,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				102.713.000,00		105.866.600,00		108.019.927,00		110.761.472,00		113.773.077,00		117.691.422,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	12	102.713.000,00	12	105.866.600,00	12	108.019.927,00	12	110.761.472,00	12	113.773.077,00	12	117.691.422,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				552.997.867,00		556.246.830,00		567.560.890,00		581.965.585,00		597.789.230,00		618.377.093,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP (nilai)	74.17	74,5	552.997.867,00	74.55	556.246.830,00	74.60	567.560.890,00	74.65	581.965.585,00	74.70	597.789.230,00	74.75	618.377.093,00		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.181.575,00		26.615.200,00		27.156.553,00		27.845.786,00		28.602.913,00		29.587.998,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	8	10	16.181.575,00	7	26.615.200,00	7	27.156.553,00	7	27.845.786,00	7	28.602.913,00	7	29.587.998,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				255.755.792,00		235.586.630,00		240.378.462,00		246.479.267,00		253.181.039,00		261.900.594,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	6	8	255.755.792,00	6	235.586.630,00	6	240.378.462,00	6	246.479.267,00	6	253.181.039,00	6	261.900.594,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				101.972.500,00		92.145.000,00		94.019.229,00		96.405.437,00		99.026.701,00		102.437.181,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	2	101.972.500,00	2	92.145.000,00	2	94.019.229,00	2	96.405.437,00	2	99.026.701,00	2	102.437.181,00		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.100.000,00		2.100.000,00		2.142.714,00		2.197.096,00		2.256.835,00		2.334.561,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	2	7.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.142.714,00	1	2.197.096,00	1	2.256.835,00	1	2.334.561,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.988.000,00		199.800.000,00		203.863.932,00		209.037.999,00		214.721.742,00		222.116.759,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	142	75	171.988.000,00	60	199.800.000,00	60	203.863.932,00	60	209.037.999,00	60	214.721.742,00	60	222.116.759,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				337.040.200,00		194.038.000,00		197.984.733,00		203.009.586,00		208.529.416,00		215.711.169,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (nilai)	5	5	337.040.200,00	5	194.038.000,00	5	197.984.733,00	5	203.009.586,00	5	208.529.416,00	5	215.711.169,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				84.950.000,00		100.000.000,00		102.034.000,00		104.623.623,00		107.468.339,00		111.169.549,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	137	10	84.950.000,00	30	100.000.000,00	30	102.034.000,00	30	104.623.623,00	30	107.468.339,00	30	111.169.549,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				252.090.200,00		94.038.000,00		95.950.733,00		98.385.963,00		101.061.077,00		104.541.620,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	80	23	252.090.200,00	16	94.038.000,00	16	95.950.733,00	16	98.385.963,00	16	101.061.077,00	16	104.541.620,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				658.222.000,00		673.464.000,00		687.162.258,00		704.602.436,00		723.760.576,00		748.686.890,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP	100	100	658.222.000,00	100	673.464.000,00	100	687.162.258,00	100	704.602.436,00	100	723.760.576,00	100	748.686.890,00		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36.430.000,00		39.000.000,00		39.793.260,00		40.803.213,00		41.912.652,00		43.356.124,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	12	36.430.000,00	12	39.000.000,00	12	39.793.260,00	12	40.803.213,00	12	41.912.652,00	12	43.356.124,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.400.000,00		318.840.000,00		325.325.206,00		333.581.959,00		342.652.053,00		354.452.989,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	6	12	305.400.000,00	12	318.840.000,00	12	325.325.206,00	12	333.581.959,00	12	342.652.053,00	12	354.452.989,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				316.392.000,00		315.624.000,00		322.043.792,00		330.217.264,00		339.195.871,00		350.877.777,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	316.392.000,00	12	315.624.000,00	12	322.043.792,00	12	330.217.264,00	12	339.195.871,00	12	350.877.777,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.777.676.100,00		2.415.981.500,00		2.465.122.564,00		2.527.687.375,00		2.596.415.194,00		2.685.835.734,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (nilai)	5	5	1.777.676.100,00	5	2.415.981.500,00	5	2.465.122.564,00	5	2.527.687.375,00	5	2.596.415.194,00	5	2.685.835.734,00		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.800.000,00		27.140.000,00		27.692.028,00		28.394.851,00		29.166.907,00		30.171.416,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	2	47.800.000,00	1	27.140.000,00	1	27.692.028,00	1	28.394.851,00	1	29.166.907,00	1	30.171.416,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.194.176.100,00		1.286.820.200,00		1.312.994.123,00		1.346.317.914,00		1.382.924.298,00		1.430.552.211,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	86	86	1.194.176.100,00	85	1.286.820.200,00	85	1.312.994.123,00	85	1.346.317.914,00	85	1.382.924.298,00	85	1.430.552.211,00		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		15.300.000,00		15.611.202,00		16.007.414,00		16.442.656,00		17.008.941,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	90	120	15.000.000,00	120	15.300.000,00	120	15.611.202,00	120	16.007.414,00	120	16.442.656,00	120	17.008.941,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.700.000,00		245.700.000,00		250.697.538,00		257.060.242,00		264.049.709,00		273.143.581,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	149	130	130.700.000,00	217	245.700.000,00	217	250.697.538,00	217	257.060.242,00	217	264.049.709,00	217	273.143.581,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				390.000.000,00		841.021.300,00		858.127.673,00		879.906.954,00		903.831.624,00		934.959.585,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	1	390.000.000,00	2	841.021.300,00	2	858.127.673,00	2	879.906.954,00	2	903.831.624,00	2	934.959.585,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-												
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP (nilai)	5	5	-	5		5		5		5		5			
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0		0		0		0		0		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-												
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPUPKP	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPUPKP (nilai)	82.83	83.00	-	83.05		83.10		83.15		83.20		83.25			
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi						0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			-	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				13.438.022.390,00		11.046.742.850,00		11.271.426.279,00		11.557.516.049,00		11.871.714.576,00		12.280.521.813,00		
Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik (persentase)	72.58	72.62	13.438.022.390,00	73.10	11.046.742.850,00	73.58	11.271.426.279,00	74.06	11.557.516.049,00	74.54	11.871.714.576,00	75.02	12.280.521.813,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12.326.448.390,00		10.277.598.850,00		10.486.638.400,00		10.752.808.793,00		11.045.130.835,00		11.425.474.330,00		
Terkelolanya talud sungai dalam kondisi baik	Panjang Talud sungai Kondisi Baik (m)	40.560,855	40.560,855	12.326.448.390,000	40.860,855	10.277.598.850,00	41.160,855	10.486.638.400,00	41.460,855	10.752.808.793,00	41.760,855	11.045.130.835,00	42.060,855	11.425.474.330,00		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.327.646.390,00		4.073.682.850,00		4.156.538.860,00		4.262.039.549,00		4.377.905.843,00		4.528.660.781,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (km)	0.44	0.84	4.327.646.390,00	0.6	4.073.682.850,00	0.6	4.156.538.860,00	0.6	4.262.039.549,00	0.6	4.377.905.843,00	0.6	4.528.660.781,00		
1.03.02.2.01.0109 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				4.176.715.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Pemutakhiran nomenklatur subkegiatan
Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (km)	N/A	0.4	4.176.715.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			-	-		4.135.944.000,00		4.220.066.360,00		4.327.179.496,00		4.444.816.661,00		4.597.875.699,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (km)	N/A	-	-	0.4	4.135.944.000,00	0.4	4.220.066.360,00	0.4	4.327.179.496,00	0.4	4.444.816.661,00	0.4	4.597.875.699,00		
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai				3.822.087.000,00		2.067.972.000,00		2.110.033.180,00		2.163.589.748,00		2.222.408.331,00		2.298.937.850,00		
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (km)	0.4	0.4	3.822.087.000,00	0.2	2.067.972.000,00	0.2	2.110.033.180,00	0.2	2.163.589.748,00	0.2	2.222.408.331,00	0.2	2.298.937.850,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.111.574.000,00		769.144.000,00		784.787.879,00		804.707.256,00		826.583.741,00		855.047.483,00		
Terlaksananya saluran irigasi kondisi baik	Panjang saluran irigasi kondisi baik (m)	8379,01	8479,01	1.111.574.000,00	8579,01	769.144.000,00	8679,01	784.787.879,00	8779,01	804.707.256,00	8879,01	826.583.741,00	8979,01	855.047.483,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.111.574.000,00		769.144.000,00		784.787.879,00		804.707.256,00		826.583.741,00		855.047.483,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (km)	0,5	0.25	1.111.574.000,00	0.25	769.144.000,00	0.25	784.787.879,00	0.25	804.707.256,00	0.25	826.583.741,00	0.25	855.047.483,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				9.341.000,00		9.760.000,00		9.958.512,00		10.211.277,00		10.488.878,00		10.850.066,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM (persentase)	100	100	9.341.000,00	100	9.760.000,00	100	9.958.512,00	100	10.211.277,00	100	10.488.878,00	100	10.850.066,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				9.341.000,00		9.760.000,00		9.958.512,00		10.211.277,00		10.488.878,00		10.850.066,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggara SPAM yang dibina (lembaga)	100	100	9.341.000,00	100	9.760.000,00	100	9.958.512,00	100	10.211.277,00	100	10.488.878,00	100	10.850.066,00		
1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				9.341.000,00		9.760.000,00		9.958.512,00		10.211.277,00		10.488.878,00		10.850.066,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	1	1	9.341.000,00	1	9.760.000,00	1	9.958.512,00	1	10.211.277,00	1	10.488.878,00	1	10.850.066,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12.014.379.705,00		12.920.553.200,00		13.183.348.690,00		13.517.966.607,00		13.885.461.247,00		14.363.612.656,00		
Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) akses aman	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman (persentase)	23.80	23.96	12.014.379.705,00	24.15	12.920.553.200,00	24.35	13.183.348.690,00	24.54	13.517.966.607,00	24.73	13.885.461.247,00	24.92	14.363.612.656,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (persentase)	19.87	20.11		20.37		20.63		20.89		21.16		21.42			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.014.379.705,00		12.920.553.200,00		13.183.348.690,00		13.517.966.607,00		13.885.461.247,00		14.363.612.656,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik (sambungan rumah (SR))	24,554	24,852	12.014.379.705,00	25,152	12.920.553.200,00	25,452	13.183.348.690,00	25,752	13.517.966.607,00	26,052	13.885.461.247,00	26,352	14.363.612.656,00		
1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				2.658.580.555,00		2.344.900.000,00		2.392.593.712,00		2.453.322.192,00		2.520.017.338,00		2.606.795.142,00		
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (unit)	120	185	2.658.580.555,00	130	2.344.900.000,00	130	2.392.593.712,00	130	2.453.322.192,00	130	2.520.017.338,00	130	2.606.795.142,00		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				4.447.455.080,00		4.525.010.200,00		4.617.045.909,00		4.734.235.124,00		4.862.938.359,00		5.030.395.585,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	9	9	4.447.455.080,00	7	4.525.010.200,00	7	4.617.045.909,00	7	4.734.235.124,00	7	4.862.938.359,00	7	5.030.395.585,00		
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				4.908.344.070,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Pemutakhiran nomenklatur subkegiatan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (m3/hari)	145	81	4.908.344.070,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				4.447.455.080,00		6.050.643.000,00		6.173.709.069,00		6.330.409.291,00		6.502.505.550,00		6.726.421.929,00		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (sambungan rumah(SR))	N/A	N/A	4.447.455.080,00	282	6.050.643.000,00	282	6.173.709.069,00	282	6.330.409.291,00	282	6.502.505.550,00	282	6.726.421.929,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				27.246.687.975,00		19.641.892.975,00		20.041.396.061,00		20.550.083.981,00		21.108.751.267,00		21.835.639.555,00		
Meningkatnya sistem drainase kondisi baik	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik (persentase)	88.44	88.49	27.246.687.975,00	88.54	19.641.892.975,00	88.59	20.041.396.061,00	88.64	20.550.083.981,00	88.68	21.108.751.267,00	88.73	21.835.639.555,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				27.246.687.975,00		19.641.892.975,00		20.041.396.061,00		20.550.083.981,00		21.108.751.267,00		21.835.639.555,00		
Terwujudnya saluran drainase dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (m)	308.909,34	310.409,34	27.246.687.975,00	311.909,34	19.641.892.975,00	313.409,34	20.041.396.061,00	314.909,34	20.550.083.981,00	316.409,34	21.108.751.267,00	317.909,34	21.835.639.555,00		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				18.657.275.000,00		10.304.825.000,00		10.514.418.311,00		10.781.293.811,00		11.074.390.236,00		11.455.741.291,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (sistem drainase perkotaan)	3	3	18.657.275.000,00	3	10.304.825.000,00	3	10.514.418.311,00	3	10.781.293.811,00	3	11.074.390.236,00	3	11.455.741.291,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				8.589.412.975,00		9.337.067.975,00		9.526.977.750,00		9.768.790.170,00		10.034.361.031,00		10.379.898.264,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (sistem drainase perkotaan)	3	3	8.589.412.975,00	3	9.337.067.975,00	3	9.526.977.750,00	3	9.768.790.170,00	3	10.034.361.031,00	3	10.379.898.264,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				32.545.226.195,00		29.066.728.280,00		29.657.926.271,00		30.410.699.619,00		31.237.434.100,00		32.313.107.630,00		
Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (persentase)	91.92	92.29	31.345.731.195,00	92.76	27.987.947.280,00	93.22	28.557.203.581,00	93.69	29.282.038.539,00	94.24	30.078.089.641,00	94.70	31.113.840.681,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				31.345.731.195,00		29.066.728.280,00		29.657.926.271,00		30.410.699.619,00		31.237.434.100,00		32.313.107.630,00		
Terwujudnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (bangunan gedung)	1001	1006	31.345.731.195,00	1012	27.987.947.280,00	1018	28.557.203.581,00	1024	29.282.038.539,00	1031	30.078.089.641,00	1037	31.113.840.681,00		
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				30.513.510.045,00		27.483.615.130,00		28.042.613.648,00		28.754.387.357,00		29.536.093.921,00		30.553.181.122,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (bangunan gedung)	24	19	30.513.510.045,00	10	27.483.615.130,00	10	28.042.613.648,00	10	28.754.387.357,00	10	29.536.093.921,00	10	30.553.181.122,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				832.221.150,00		504.332.150,00		514.589.933,00		527.651.182,00		541.995.720,00		560.659.559,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	11	7	832.221.150,00	4	504.332.150,00	4	514.589.933,00	4	527.651.182,00	4	541.995.720,00	4	560.659.559,00		
Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (persentase)	100	100	1.199.495.000,00	100	1.078.781.000,00	100	1.100.722.690,00	100	1.128.661.080,00	100	1.159.344.459,00	100	1.199.266.949,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.199.495.000,00		29.066.728.280,00		29.657.926.269,00		30.410.699.618,00		31.237.434.099,00		32.313.107.629,00		
Terselenggaranya layanan konsultasi teknis permohonan PBG dan SLF	Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik (persentase)	100	100	1.199.495.000,00	100	1.078.781.000,00	100	1.100.722.690,00	100	1.128.661.080,00	100	1.159.344.459,00	100	1.199.266.949,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1.199.495.000,00		1.078.781.000,00		1.100.722.690,00		1.128.661.080,00		1.159.344.459,00		1.199.266.949,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (dokumen)	12	12	1.199.495.000,00	12	1.078.781.000,00	12	1.100.722.690,00	12	1.128.661.080,00	12	1.159.344.459,00	12	1.199.266.949,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				17.239.319.700,00		27.379.425.653,00		27.936.305.026,00		28.645.380.424,00		29.424.123.565,00		30.437.355.022,00		
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota				17.239.319.700,00		27.379.425.653,00		27.936.305.026,00		28.645.380.424,00		29.424.123.565,00		30.437.355.022,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				17.239.319.700,00		27.379.425.653,00		27.936.305.026,00		28.645.380.424,00		29.424.123.565,00		30.437.355.022,00		
Terwujudnya jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi mantap (m)	186,495			186,71	27.379.425.653,00	186,82	27.936.305.026,00	186,94	28.645.380.424,00	187,06	29.424.123.565,00	187,17	30.437.355.022,00		
1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan				8.313.793.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Pemutakhiran nomenklatur subkegiatan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	20.188	4.86	8.313.793.700	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan				7.848.046.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (km)	5.901	3.08	7.848.046.000	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.10.2.01.0038 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.077.480.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (jembatan)	4	4	1.077.480.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				0,00		10.250.461.948,00		10.458.949.551,00		10.724.417.150,00		11.015.967.346,00		11.395.306.585,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	20.188	N/A		3.12	10.250.461.948,00	3.12	10.458.949.551,00	3.12	10.724.417.150,00	3.12	11.015.967.346,00	3.12	11.395.306.585,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				0,00		15.800.301.705,00		16.121.669.371,00		16.530.867.334,00		16.980.269.624,00		17.564.991.996,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (km)	5.901	N/A		6.461	15.800.301.705,00	6.461	16.121.669.371,00	6.461	16.530.867.334,00	6.461	16.980.269.624,00	6.461	17.564.991.996,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		1.328.662.000,00		1.355.686.104,00		1.390.095.940,00		1.427.886.595,00		1.477.056.441,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (jembatan)	4	N/A		3	1.328.662.000,00	3	1.355.686.104,00	3	1.390.095.940,00	3	1.427.886.595,00	3	1.477.056.441,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				636.010.000,00		351.545.000,00		358.695.192,00		367.799.544,00		377.798.411,00		390.808.051,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi (persentase)	70.83	88,42	636.010.000,00	89.44	351.545.000,00	90.74	358.695.192,00	92.04	367.799.544,00	93.33	377.798.411,00	94.63	390.808.051,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				388.750.000,00		201.495.000,00		205.593.275,00		210.811.614,00		216.542.664,00		223.999.398,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi (persentase)	100	100	388.750.000,00	100	201.495.000,00	100	205.593.275,00	100	210.811.614,00	100	216.542.664,00	100	223.999.398,00		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				147.000.000,00		90.000.000,00		91.830.541,00		94.161.370,00		96.721.208,00		100.051.842,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (orang)	100	140		100	90.000.000,00	100	91.830.541,00	100	94.161.370,00	100	96.721.208,00	100	100.051.842,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				97.485.000,00		67.880.000,00		69.260.634,00		71.018.598,00		72.949.284,00		75.461.322,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	10	10		10	67.880.000,00	10	69.260.634,00	10	71.018.598,00	10	72.949.284,00	10	75.461.322,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				144.265.000,00		43.615.000,00		44.502.100,00		45.631.646,00		46.872.172,00		48.486.234,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (orang)	122	140		100	43.615.000,00	100	44.502.100,00	100	45.631.646,00	100	46.872.172,00	100	48.486.234,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				247.260.000,00		150.050.000,00		153.101.917,00		156.987.930,00		161.255.747,00		166.808.653,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (persentase)	100		247.260.000,00	100	150.050.000,00	100	153.101.917,00	100	156.987.930,00	100	161.255.747,00	100	166.808.653,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				158.412.000,00		107.066.000,00		109.243.651,00		112.016.459,00		115.061.698,00		119.023.894,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (dokumen)	2	2	158.412.000,00	1	107.066.000,00	1	109.243.651,00	1	112.016.459,00	1	115.061.698,00	1	119.023.894,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				88.848.000,00		42.984.000,00		43.858.266,00		44.971.471,00		46.194.049,00		47.784.759,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (layanan informasi)	12	12	88.848.000,00	12	42.984.000,00	12	43.858.266,00	12	44.971.471,00	12	46.194.049,00	12	47.784.759,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				33.605.881.125,00		30.411.984.800,00		31.030.544.417,00		31.818.157.367,00		32.683.154.495,00		33.808.611.985,00		
Meningkatnya kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan (persentase)	81.53	83.87	33.605.881.125,00	86.28	30.411.984.800,00	88.68	31.030.544.417,00	91.06	31.818.157.367,00	93.43	32.683.154.495,00	95.78	33.808.611.985,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				33.605.881.125,00		30.411.984.800,00		31.030.544.417,00		31.818.157.367,00		32.683.154.495,00		33.808.611.985,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan Ramah Lingkungan	Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan (unit)	24027	24800	33.605.881.125,00	25600	30.411.984.800,00	26400	31.030.544.417,00	27200	31.818.157.367,00	28000	32.683.154.495,00	28800	33.808.611.985,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				33.605.881.125,00		30.411.984.800,00		31.030.544.417,00		31.818.157.367,00		32.683.154.495,00		33.808.611.985,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (unit)	1594	1310	33.605.881.125,00	1286	30.411.984.800,00	1286	31.030.544.417,00	1286	31.818.157.367,00	1286	32.683.154.495,00	1286	33.808.611.985,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.500.208.964,00		21.670.673.860,00		27.611.441.005,00		28.172.670.516,00		28.789.041.687,00		29.591.009.147,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.944.163.132,00		4.979.764.000,00		5.081.049.100,00		5.210.015.579,00		5.351.653.213,00		5.535.939.530,00		
Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik (persentase)	96.16	97.16	4.944.163.132,00	97.84	4.979.764.000,00	98.51	5.081.049.100,00	99.18	5.210.015.579,00	100.00	5.351.653.213,00	100.00	5.535.939.530,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.944.163.132,00		4.979.764.000,00		5.081.049.100,00		5.210.015.579,00		5.351.653.213,00		5.535.939.530,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik (Ha)	1429,04	1444,04	4.944.163.132,00	1454,04	4.979.764.000,00	1464,04	5.081.049.100,00	1474,04	5.210.015.579,00	1486,18	5.351.653.213,00	1486,18	5.535.939.530,00		
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				529.404.847,00		331.000.000,00		337.729.240,00		346.310.260,95		355.703.747,36		367.929.564,76		
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	7	11	529.404.847,00	4	331.000.000,00	4	337.729.240,00	4	346.310.260,95	4	355.703.747,36	4	367.929.564,76		
1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4.414.758.285,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Pemutakhiran nomenklatur subkegiatan
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (kawasan)	3	5	4.414.758.285,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		4.648.764.000,00		4.743.319.860,00		4.863.705.318,05		4.995.949.465,64		5.168.009.965,24		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (kawasan)	N/A	N/A	0,00	2	4.648.764.000,00	2	4.743.319.860,00	2	4.863.705.318,05	2	4.995.949.465,64	2	5.168.009.965,24		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.178.923.486,00		2.897.509.960,00		2.956.443.392,00		3.031.483.426,00		3.113.896.258,00		3.221.124.521,00		
Meningkatnya pengembangan perumahan	Persentase rumah susun yang dipelihara (persentase)	100	100	2.080.823.486,00	100	2.800.509.960,00	100	2.857.470.476,00	100	2.929.998.394,00	100	3.009.652.290,00	100	3.113.290.870,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program (persentase)	100	100	98.100.000,00	100	97.000.000,00	100	98.972.916,00	100	101.485.032,00	100	104.243.968,00	100	107.833.651,00		
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				98.100.000,00		97.000.000,00		98.972.916,00		101.485.032,00		104.243.968,00		107.833.651,00		
Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM (persentase)	100	100	98.100.000,00	100	97.000.000,00	100	98.972.916,00	100	101.485.032,00	100	104.243.968,00	100	107.833.651,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				98.100.000,00		97.000.000,00		98.972.916,00		101.485.032,00		104.243.968,00		107.833.651,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	98.100.000,00	1	97.000.000,00	1	98.972.916,00	1	101.485.032,00	1	104.243.968,00	1	107.833.651,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2.080.823.486,00		2.800.509.960,00		2.857.470.476,00		2.929.998.394,00		3.009.652.290,00		3.113.290.870,00		
Terlaksananya pengelolaan rusunawa	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun (persentase)	92,27	88,43	2.080.823.486,00	89,53	2.800.509.960,00	90,65	2.857.470.476,00	91,79	2.929.998.394,00	92,93	3.009.652.290,00	94,09	3.113.290.870,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2.080.823.486,00		2.800.509.960,00		2.857.470.476,00		2.929.998.394,00		3.009.652.290,00		3.113.290.870,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (dokumen)	3	3	2.080.823.486,00	3	2.800.509.960,00	3	2.857.470.476,00	3	2.929.998.394,00	3	3.009.652.290,00	3	3.113.290.870,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				15.001.322.346,00		13.793.399.900,00		14.073.948.513,00		14.431.171.511,00		14.823.492.216,00		15.333.945.096,00		
Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase permukiman kumuh yang tertangani (persentase)	50.19	63.27	15.001.322.346,00	71.98	13.793.399.900,00	80.70	14.073.948.513,00	89.42	14.431.171.511,00	100.00	14.823.492.216,00	100.00	15.333.945.096,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	
	Persentase pemenuhan rumah layak huni (persentase)	98,70	98.86		99.02		99.18		99.34		99.50		99.66			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				15.001.322.346,00		13.793.399.900,00		14.073.948.513,00		14.431.171.511,00		14.823.492.216,00		15.333.945.096,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	57,58	72,58	15.001.322.346,00	82,58	13.793.399.900,00	92,58	14.073.948.513,00	102,58	14.431.171.511,00	114,72	14.823.492.216,00	114,72	15.333.945.096,00		
	Jumlah RTLH tertangani (unit)	560	760		960		1160		1360		1560		1760			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				8.508.645.200,00		9.004.419.900,00		9.187.563.834,00		9.420.761.297,00		9.676.870.769,00		10.010.097.682,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (unit)	115	114	8.508.645.200,00	125	9.004.419.900,00	125	9.187.563.834,00	125	9.420.761.297,00	125	9.676.870.769,00	125	10.010.097.682,00		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				6.492.677.146,00		4.788.980.000,00		4.886.384.679,00		5.010.410.214,00		5.146.621.447,00		5.323.847.414,00		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0.25	0.76	6.492.677.146,00	0.25	4.788.980.000,00	0.25	4.886.384.679,00	0.25	5.010.410.214,00	0.25	5.146.621.447,00	0.25	5.323.847.414,00		
1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				4.375.800.000,00		0		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pengembangan dan/atau pemanfaatan kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (persentase)	10	15	4.375.800.000,00	N/A	0	25	5.500.000.000	30	5.500.000.000	35	5.500.000.000	50	5.500.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				4.375.800.000,00				5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (kegiatan)	1	1	4.375.800.000,00	1	0	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000		
1.03.13.5.02.0009 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede				4.375.800.000,00		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede (Dokumen)	N/A	1	4.375.800.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
1.03.13.5.02.0001 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				0		0		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen)	1		0	1	0	1	5.500.000.000,00	1	5.500.000.000,00	1	5.500.000.000,00	1	5.500.000.000,00		
TOTAL PAGU				**180.836.145.021,00**		**169.311.242.798,00**		**178.254.921.274,00**		**182.639.762.590,00**		**187.455.421.276,00**		**193.721.128.943,00**		

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan secara rinci kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk secara efektif mendukung program-program prioritas pembangunan daerah dan program-program strategis Wali Kota. Setiap sub kegiatan direncanakan untuk dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran program prioritas serta memastikan keterpaduan dan efisiensi dalam implementasi strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Uraian kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Strategis Wali Kota yang Didukung	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Modernisasi Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) - Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan - Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	

No	Program Strategis Wali Kota yang Didukung	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
			tepat waktu	Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
2	- Kampung Layak Huni	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
3	- Kampung Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya pengembangan perumahan	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
4	- Kampung Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	

No	Program Strategis Wali Kota yang Didukung	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
5	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
6	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
7	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) akses aman	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	

No	Program Strategis Wali Kota yang Didukung	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
				(SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
				Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
8	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya sistem drainase kondisi baik	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
9	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
10	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	

No	Program Strategis Wali Kota yang Didukung	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
				Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
	- Kota Hijau, Sehat dan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah (PD) periode 2025-2029, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur fundamental untuk memantau progres, mengevaluasi efektivitas, dan melakukan penyesuaian strategi. Dengan demikian, optimalisasi kinerja dan penyediaan layanan publik yang berkualitas dapat tercapai. Rincian IKU untuk setiap tujuan dan sasaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Base-line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah	Angka Indeks	92,16	77,54	77,98	78,43	78,89	79,35	79,81	
2	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	Angka Indeks	60,25	92,38	94,17	95,96	97,75	99,91	99,94	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	%	N/A	86,18%	86,58%	86,98%	87,38%	87,77%	88,16%	
4	Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik	%	N/A	72,62%	73,10%	73,58%	74,06%	74,54%	75,02%	
5	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik	%	N/A	93,57%	94,07%	94,65%	95,24%	95,86%	96,44%	
6	Persentase air minum dan sanitasi akses aman	%	N/A	49,66%	50,07%	50,48%	50,89%	51,30%	51,71%	
7	Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan	%	N/A	89,11%	91,67%	94,22%	96,78%	99,87%	99,91%	
8	Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	%	N/A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PUPKP	Nilai	A (87,475)	A (87,59-90)	A (87,63-90)	A (87,67-90)	A (87,71-90)	A (87,76-90)	A (87,80-90)	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah periode 2025-2029 juga diarahkan pada pencapaian target kinerja yang terukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk memantau progres, menilai efektivitas program, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rincian IKK untuk urusan pemerintah daerah yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Base-line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase (%)	97,83 %	99,22%	99,38%	99,53%	99,69%	99,84%	100%	
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persentase (%)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase (%)	79,96 %	80,01%	80,06%	80,11%	80,16%	80,21%	80,26%	
6	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	28,87 %	38,84%	47,48%	56,11%	64,74%	73,37%	82,00%	
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase (%)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persentase (%)	67,24 %	71,79%	77,34%	83,9%	91,45	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Base-line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase (%)	1,30 %	1,14%	0,98%	0,82%	0,66%	0,50%	0,34%	
10	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase (%)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah dikorelasikan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029, dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" yang juga selaras dengan produk perencanaan pembangunan lainnya, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Selain itu, isu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan juga telah diselaraskan dengan target-target kinerja dari Kementerian dan Lembaga serta perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan serta program kegiatan pendukungnya untuk periode satu tahun.

Sebagai kesimpulan, Renstra DPUPKP 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam memberikan arah pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah. Kaidah pelaksanaan Renstra ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pelayanan minimal yang berlaku.

Selanjutnya, pelaksanaan Renstra ini akan dikendalikan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi, baik secara internal oleh Dinas maupun secara eksternal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan secara periodik melalui laporan kinerja, review capaian indikator, serta forum koordinasi lintas perangkat daerah. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan target kinerja dapat tercapai dengan lebih optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Renstra DPUPKP 2025–2029 sangat bergantung pada sinergi, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Kota Yogyakarta yang adil makmur, lestari, dan berkeadaban.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan urusan urusan pekerjaan umum dan perumahan serta program kegiatan pendukungnya untuk periode satu tahun.

LAMPIRAN

POHON KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

Sasaran Daerah:
Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang mantap, berkelanjutan, dan tahan terhadap bencana

Indikator Kinerja Utama:
Indeks Kelangsungan Infrastruktur Wilayah

Tujuan OPD:
Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Permukiman dan Permukiman

Indikator Kinerja:
a. Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah
b. Indeks Prasarana Permukiman dan Permukiman

CSF 1
(Critical Success Factor)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik

Indikator Kinerja:
Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik

Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota
Indikator Kinerja:
Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap

Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas tanpa perserangan jalan umum kota yang ramah lingkungan
Indikator Kinerja:
Persentase perserangan jalan umum ramah lingkungan

Intermediate Outcome
Meningkatnya sistem drainase kondisi baik
Indikator Kinerja:
Persentase pemeriksaan drainase kondisi baik

Initial Outcome
Tersedianya jalan dalam kondisi mantap
Indikator Kegiatan:
Panjang jalan dalam kondisi mantap

Initial Outcome
Tersedianya Perlengkapan Jalan Ramah Lingkungan
Indikator Kinerja:
Jumlah lokasi LPJU yang ramah lingkungan

Initial Outcome
Terwujudnya saluran drainase dalam kondisi baik
Indikator Kegiatan:
Panjang saluran drainase dalam kondisi baik

Output
Terlaksanaanya Pemeliharaan jalan secara berkala
Indikator Kegiatan:
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala

Output
Terlaksanaanya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Indikator Kegiatan:
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara

Output
Terlangunnya sistem drainase perkotaan
Indikator Kinerja:
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun

CROSSCUTTING
1. Wilayah/Kemantren

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Pemeliharaan Lampu dan MCB (Mini Circuit Breaker) PJU Lingkungan Kampung

Output
Terpeliharanya jembatan secara rutin
Indikator Kinerja:
Terpeliharanya jembatan secara rutin

CROSSCUTTING
1. Wilayah/Kemantren

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Pemeliharaan drainase yang dengan dimensi di bawah 50 cm

Output
Berkurangnya dan Terpeliharanya Genangan Perkotaan
Indikator Kinerja:
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Berkurang dan Terpelihara

Output
Terehabilitasinya Tanggul Sungai
Indikator Kinerja:
Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi

CROSSCUTTING
1. Wilayah/Kemantren

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Pemeliharaan drainase yang dengan dimensi di bawah 50 cm

Output
Berkurangnya dan Terpeliharanya Tanggul dan Talang Sungai
Indikator Kinerja:
Panjang Tanggul dan Talang Sungai yang Dipelihara

CSF 2
(Critical Success Factor)

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kondisi Baik

Indikator Kinerja:
Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik

Intermediate Outcome
Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik
Indikator Kinerja:
Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik

Initial Outcome
Terbaliknya talud sungai dalam kondisi baik
Indikator Kinerja:
Panjang talud kondisi baik

Initial Outcome
Tertaksanaanya saluran irigasi kondisi baik
Indikator Kinerja:
Panjang saluran irigasi kondisi baik

Output
Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing
Indikator Kinerja:
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun

Output
Berkurangnya dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan
Indikator Kinerja:
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara

CSF 3
(Critical Success Factor)

Meningkatnya Pemerintah Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik

Indikator Kinerja:
Persentase Pemerintah Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik

Intermediate Outcome
Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
Indikator Kinerja:
Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

Intermediate Outcome
Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan pemerikisan intromendasi/teknis Penetapkan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu
Indikator Kinerja:
Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF

Initial Outcome
Tersedianya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
Indikator Kinerja:
Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

Initial Outcome
Terselenggaranya layanan konsultasi teknis permohonan PBG dan SLF
Indikator Kinerja:
Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik

Output
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengadvikasian
Indikator Kinerja:
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diadvokasikan

CROSSCUTTING
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2. Dinas Perizinan

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Penyusunan Rujukan Perkenalkan Ruang
2. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Output
Terselenggaranya Pendataan Pemetaan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (SIMBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pendik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Indikator Kinerja:
Jumlah Pemerintah Pemetapan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (SIMBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pendik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Intermediate Outcome
Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi
Indikator Kinerja:
Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

Intermediate Outcome
Terlaksanaanya Pemyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Indikator Kinerja:
Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

Intermediate Outcome
Terlaksanaanya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Output
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan
Indikator Kinerja:
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang Dilatih

Output
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

Output
Tertaksanaanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Persentase penyelenggara SPAM yang dibina

Output
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Indikator Kinerja:
Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya

CROSSCUTTING
1. PDAM
2. Bappeda

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Penyediaan layanan akses air minum aman
2. Penyusunan regulasi/kebijakan terkait penyediaan air minum

Output
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
Indikator Kinerja:
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun

Output
Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
Indikator Kinerja:
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioperasikan

Output
Berkurangnya dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Indikator Kinerja:
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara

CSF 4
(Critical Success Factor)

Meningkatnya akses sanitasi aman dan akses air minum

Indikator Kinerja:
Persentase akses sanitasi aman dan akses air minum

Intermediate Outcome
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM
Indikator Kinerja:
Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM

Intermediate Outcome
Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
a. Persentase pelayanan SPALD-S atman aman
b. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman

Initial Outcome
Terlaksanaanya Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Persentase Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Initial Outcome
Terlaksanaanya Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik diDaerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Jumlah Cambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik

Output
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

Output
Berkuranganya Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Indikator Kinerja:
Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disipemerikan

Output
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
Indikator Kinerja:
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun

Output
Terlaksanaanya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Indikator Kinerja:
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

CROSSCUTTING
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2. Wilayah/Kemantren

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Dukungan terkait konsolidasi lahan dalam penataan kawasan kumuh.
2. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman sesuai kewenangan

CSF 5
(Critical Success Factor)

Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan

Indikator Kinerja:
Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan

Intermediate Outcome
Meningkatnya kawan kwasan permukiman kumuh yang ditangani
Indikator Kinerja:
a. Persentase permukiman kumuh yang tertangani
b. Persentase permukiman rumah layak huni

Intermediate Outcome
Meningkatnya kawasan permukiman dengan sanna dan prasarana dasar yang baik
Indikator Kinerja:
Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik

Initial Outcome
Terlaksanaanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator Kinerja:
Luas Kawasan Kumuh yang tertangani Jumlah RTLH yang tertangani

Initial Outcome
Terlaksanaanya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik

Output
Terlaksanaanya Penyediaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Output
Terlaksanaanya Pemanfaatan Rumah Susun Milik Negara, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diota
Indikator Kinerja:
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkumuhan, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diota

Output
Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Output
Terbangunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

CROSSCUTTING
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2. Wilayah/Kemantren

DUKUNGAN KEGIATAN:
1. Dukungan terkait konsolidasi lahan dalam penataan kawasan permukiman.
2. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman sesuai kewenangan.

CSF 6
(Critical Success Factor)

Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja:
Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik

Intermediate Outcome
Meningkatnya pengembangan perumahan
Indikator Kinerja:
a. Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program
b. Presentase rumah susun yang dipelihara

Initial Outcome
Terlaksanaanya pengelolaan nusunawa
Indikator Kinerja:
Persentase tercapainya target retribusi sewa nusun

Initial Outcome
Terlaksanaanya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:
Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM

Output
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Output
Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyangga/non Internal

Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif

Indikator Kinerja:
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi DPUPKP

Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas layanan DPUPKP
Indikator Kinerja:
Indeks Kepuasan Masyarakat

Intermediate Outcome
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPKP
Indikator Kinerja:
Nilai SAKIP, Nilai SPIP

Intermediate Outcome
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset DPUPKP
Indikator Kinerja:
Nilai Pengadun Keuangan dan Aset

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum DPUPKP
Indikator Kinerja:
Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa DPUPKP
Indikator Kinerja:
Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada LPSE DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPUPKP
Indikator Kinerja:
IP ASN DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPUPKP
Indikator Kinerja:
a. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP
b. Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kemetangan statistik sektoral DPUPKP
Indikator Kinerja:
Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan DPUPKP
Indikator Kinerja:
Nilai Pengadun Keuangan dan Aset DPUPKP

Initial Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset DPUPKP
Indikator Kinerja:
Nilai Pengadun Keuangan dan Aset DPUPKP

Output
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Indikator Kinerja:
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Output
Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output
Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Output
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja:
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Output
Tersedianya Modal
Indikator Kinerja:
Jumlah Pokmi Modal yang Disediakan

Output
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Output
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Output
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Output
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output
Terlaksanaanya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Output
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Output
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Output
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Output
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Kinerja:
Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Output
Terlaksanaanya Pemeliharaan Mebel
Indikator Kinerja:
Jumlah Meber yang Dipelihara

Output
Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja:
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Output
Tersedianya Listrik, Telepon, Internet dan Pengelolaan Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebersihan Kantor

Output
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja:
Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

Output
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja:
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Output
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Output
Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

CROSSCUTTING

1. Bappeda
2. BPKAD
3. BKPSDM
4. Setda Kota Jogjakarta
5. Inspektorat
6. Dinas Kominfosan
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dukungan Kegiatan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2. Penyusunan Dokumen Penganggaran, Peratausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3. Pengelolaan urusan kepegawain serta Pendidikan dan pelatihan
4. Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
5. Pengawasan dan Consulting
6. Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7. Pengelolaan kearsipan

Crosscutting berhubungan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
2	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
3	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
4	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Peratausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawain serta Pendidikan dan pelatihan

CASCADING PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kondisi Awal	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah	(40 % x Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik) + (10% x Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik) + (25% x Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik) + (25% x Persentase air minum dan sanitasi akses aman)) x 100	75,80%	77,54%	77,98%	78,43%	78,89%	79,35%	79,81%	1.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	(50% x Presentase jalan dan jembatan kondisi baik) + (15% x Presentase penerangan jalan umum ramah lingkungan) + (35% x Presentase pemenuhan drainase kondisi baik)	85,79%	86,18%	86,58%	86,98%	87,38%	87,77%	88,16%	1.1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	(60% jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	85,22%	85,26%	85,30%	85,35%	85,39%	85,44%	85,48%	1.1.1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi mantap (km)	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	186,495	186,59	186,71	186,82	186,94	187,06	187,17	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara secara berkala	Ketua Tim Kerja Peningkatan Jalan dan Jembatan	5,901 Km	3,08 km	6,461 km	6,461 km	6,461 km	6,461 km	6,461 km
																												Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara secara rutin	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20,188 km	4,86 km	3,12 km	3,12 km	3,12 km	3,12 km	3,12 km
																												Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya jembatan secara rutin	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 jembatan	4 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan
																						1.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UNTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum	81,53%	83,87%	86,28%	88,68%	91,06%	93,43%	95,78%	1.1.2.1 Penyediaan Penlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Ramah Lingkungan	Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan	Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan (unit)	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum	24027	24800	25600	26400	27200	28000	28800	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum	1594 unit	1310 Unit	1286 Unit	1286 Unit	1286 Unit	1286 Unit	1286 Unit
																						1.1.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya sistem drainase kondisi baik	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase) x 100%	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase	88,44%	88,49%	88,54%	88,59%	88,64%	88,68%	88,73%	1.1.3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya saluran drainase dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Jumlah Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (m')	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase	308.909,34	310.409,34	311.909,34	313.409,34	314.909,34	316.409,34	317.909,34	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan
																												Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan
												1.2 Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kondisi Baik	Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik	(100% x Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik)	72,58%	72,62%	73,10%	73,58%	74,06%	74,54%	75,02%	1.2.1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	(Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase	72,58%	72,62%	73,10%	73,58%	74,06%	74,54%	75,02%	1.2.1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya talud sungai dalam kondisi baik	Panjang Talud Sungai Kondisi Baik	Panjang Talud Sungai Kondisi Baik (m')	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase	40560,855	40560,855	40860,855	41160,855	41460,855	41760,855	42060,855	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	0,4 KM	0,4 KM	0,2 KM	0,2 KM	0,2 KM	0,2 KM	0,2 KM
																												Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Ketua Tim Kerja Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	N/A	0,4 KM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
																												Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Ketua Tim Kerja Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	N/A	N/A	0,4 KM	0,4 KM	0,4 KM	0,4 KM	0,4 KM
																												Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	0,44 KM	0,84 KM	0,6 KM	0,6 KM	0,6 KM	0,6 KM	0,6 KM
																										1.2.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya saluran irigasi kondisi baik	Panjang saluran irigasi kondisi baik	Panjang saluran irigasi kondisi baik (m')	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase	8379,01	8479,01	8579,01	8679,01	8779,01	8879,01	8979,01	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	0,5 KM	0,25 KM	0,25 KM	0,25 KM	0,25 KM	0,25 KM	0,25 KM
												1.3 Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik	(Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik + Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai standar + Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi)/3 x 100%	87,58%	93,57%	94,07%	94,65%	95,24%	95,86%	96,44%	1.3.1 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	Kepala Bidang Penataan Bangunan	91,92%	92,29%	92,76%	93,22%	93,69%	94,24%	94,70%	1.3.1.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (unit)	Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung	1001	1006	1012	1018	1024	1031	1037	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Pembangunan Bangunan Gedung	11 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
																												Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Ketua Tim Kerja Perencanaan Bangunan Gedung	24 Bangunan Gedung	18 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung
																						2. Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					Terselenggaranya layanan konsultasi teknis permohonan PBG dan SLF	Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik	(Jumlah pemohon yang mendapatkan Layanan Konsultasi PBG/SLF di MPP / Jumlah pemohon yang datang untuk mendapatkan Layanan Konsultasi PBG.SLF di MPP) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan PendataanBangunanGedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan PendataanBangunanGedungm elalui SIMBG	Ketua Tim Kerja Pengendalian Bangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																						1.3.2 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi	(((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi / Jumlah target peserta pelatihan dan uji sertifikasi jasa konstruksi) + (Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi /Jumlah target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun / Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 3 x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	70,83%	88,42%	89,44%	90,74%	92,04%	93,33%	94,63%	1.3.2.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan/Jumlah pelatihan yang direncanakan) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang Dilatih	Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi	122 orang	140 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
																												Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga KerjaKonstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atauAnalis yangDifasilitasi Sertifikasi	Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi	122 orang	140 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
																												Peminbaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitanya	Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga
																										1.3.2.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disperasikan/Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																												Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disperasikan		12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi
												1.4 Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Akses Aman	Persentase air minum dan sanitasi akses aman	(10% x Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM) + (90% x (Persentase pelayanan SPALD-S akses aman + Persentase pelayanan SPALD-T akses aman) x 100%	49,30%	49,66%	50,07%	50,48%	50,89%	51,30%	51,71%	1.4.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan + Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum SPAM bukan jaringan perpipaan) /Total Rumah Tangga)	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.4.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggara SPAM yang dibina	Jumlah lembaga penyelenggara SPAM yang dibina/Jumlah lembaga penyelenggara SPAM) x 100%	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitanya	Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
																						1.4.2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) akses aman	1. Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jamban keluarga dengan tangki septick aman) / (Jumlah total KK x 100%	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	23,80%	23,96%	24,15%	24,35%	24,54%	24,73%	24,92%	1.4.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah pada SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik	Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi = Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal)	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.554	24.852	25.152	25.452	25.752	26.052	26.352	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnyi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman	N/A	115 M3/Hari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
																												Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman	N/A	N/A	282 Sambungan Rumah (SR)	282 Sambungan Rumah (SR)	282 Sambungan Rumah (SR)	282 Sambungan Rumah (SR)	282 Sambungan Rumah (SR)
																												Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman	120 Unit	97 Unit	130 Unit	130 Unit	130 Unit	130 Unit	130 Unit
																						2. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi = Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%			19,87%	20,11%	20,37%	20,63%	20,89%	21,16%	21,42%						23,80%	23,96%	24,15%	24,35%	24,54%	24,73%	24,92%	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasidan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah	9 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
	Indeks Prasarana Penunjang dan Permukiman	(70% x Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan) + (30% x Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik)										1.5. Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan	((Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani + Presentase pemenuhan rumah layak huni)/2)+ (Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik)) / 2 x 100%	85,30%	89,11%	91,67%	94,22%	96,78%	99,87%	99,91%	1.5.1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	a. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani b. Persentase pemenuhan rumah layak huni	(a. (Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100% b. (Jumlah seluruh rumah - Jumlah rumah tidak layak huni) / (Jumlah seluruh rumah) x 100%	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,19%	63,27%	71,98%	80,70%	89,42%	100,00%	100,00%	1.5.1.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani hingga tahun berjalan	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	57,58	72,58	82,58	92,58	102,58	114,72	114,72	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman	0,6 Ha	0,69 Ha	0,25 Ha	0,25 Ha	0,25 Ha	0,25 Ha	0,25 Ha
																98,70%	98,86%	99,02%	99,18%	99,34%	99,50%	99,66%						Jumlah RTLH tertangani	Jumlah RTLH yang tertangani hingga tahun berjalan	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	560	760	960	1160	1360	1560	1760	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman	115 Unit	114 Unit Rumah	125 Unit Rumah	125 Unit Rumah	125 Unit Rumah	125 Unit Rumah	125 Unit Rumah
																						1.5.2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	96,16%	97,16%	97,84%	98,51%	99,18%	100,00%	100,00%	1.5.2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik	(Total luas kawasan permukiman - Luas kawasan permukiman kumuh)	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1429,04	1444,04	1454,04	1464,04	1474,04	1486,18	1486,18	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, dan, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan LingkunganKawasanCagarBud aya, KawasanPariwisata,KawasanS istem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman	3 Kawasan	5 Kawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
																												Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman	N/A	N/A	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan
																												Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman	7 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
												1.6. Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	(Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program + Presentase rumah susun yang dipelihara)/2 x 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.6.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program) x 100%	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

| No | Nama Perangkat Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Kondisi Awal | Target | | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Kondisi Awal | Target | | | | | | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Pengampu | Kondisi Awal | Target | | | | | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Pengampu | Kondisi Awal | Target | | | | | | Sub Kegiatan | Sasaran Operasional (Sub Output) | Indikator Kinerja (Sub Output) | Pengampu | Kondisi Awal | Target | | | | | |
|---|---|---

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan alat ukur penilaian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini. Diharapkan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahun kedepan dapat diimplementasikan secara konsisten dan akuntabel.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo H.P., ST. MA., MTP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197204111998031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 4
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II – 1
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... II – 1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... II – 5
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia..... II – 5
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana..... II – 6
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II – 7
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan..... II – 14
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah..... II – 15
2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II – 15
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... II – 15
2.2.2. Isu Strategis..... II – 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran..... III – 4
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... III – 4
3.2.1 Strategi..... III – 4
3.2.2. Arah Kebijakan..... III – 5

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan..... IV – 4
4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan..... IV – 41

BAB V PENUTUP..... V – 1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Tahun 2025.....	II – 5
Tabel 2.2	Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2025.....	II – 6
Tabel 2.3	Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025.....	II – 6
Tabel 2.3	Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025.....	II – 6
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II – 8
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II – 13
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan.....	II – 14
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	II – 20
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III – 3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.....	III – 4
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..	III – 6
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	IV – 7
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan.....	IV – 20
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV – 39
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.....	IV – 42
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.....	IV – 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	II – 1
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.....	II – 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen strategis, Renstra Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan korelasinya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

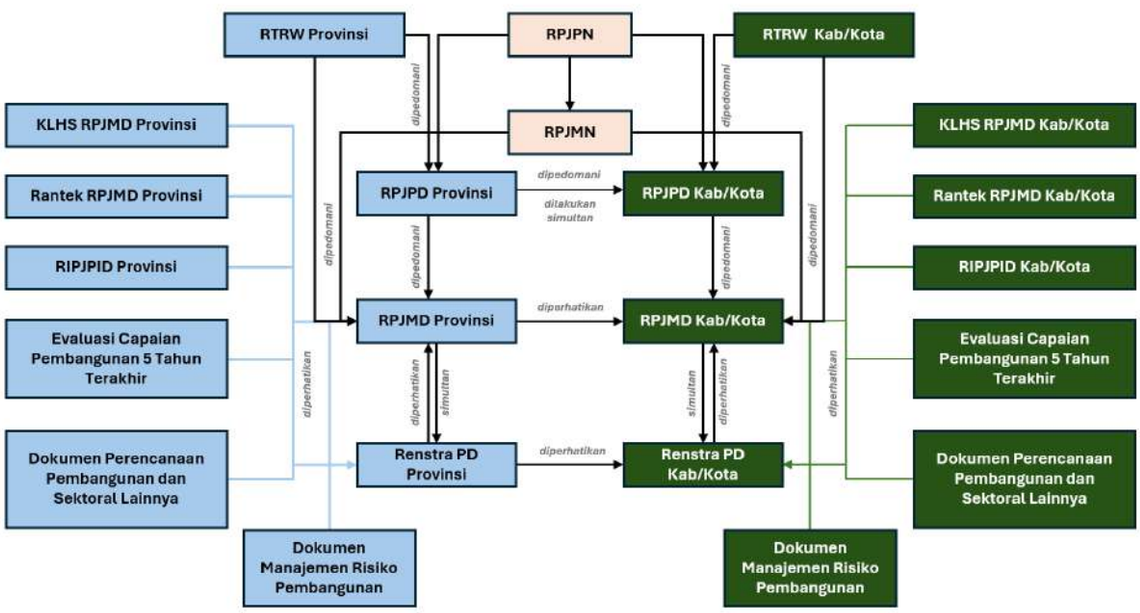

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dan merupakan hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan dan urusan penataan ruang yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O43);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;

18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43); dan
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51); dan
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;
27. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek penataan ruang dan pertanahan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam

kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah meliputi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah dan mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan serta Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini disajikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan uraian program, kegiatan, subkegiatan meliputi kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah, serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan ruang
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan penataan ruang
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan dan penataan ruang
e. Pelaksanaan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
    1. Seksi Penatausahaan Pertanahan; dan
    2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan.
d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
    1. Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
    2. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri atas:
    1. Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
    2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

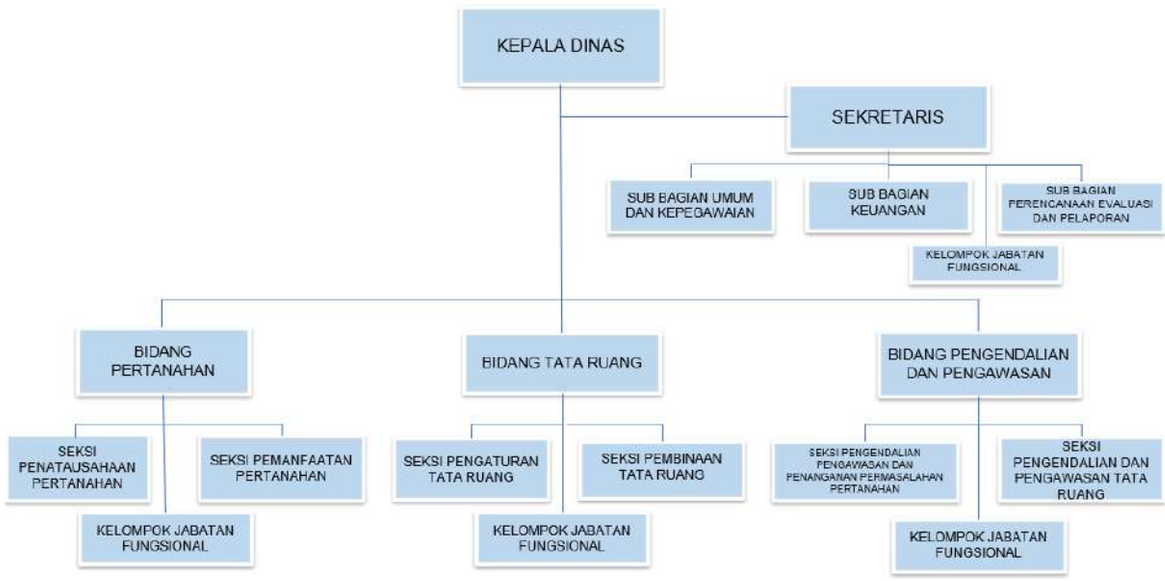

Sumber: Perwal No. 37 Tahun 2023

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta memiliki susunan organisasi sebagaimana pada Gambar 2.1 dengan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagai berikut:

A. Sekretariat

Tugas:

Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas

Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
4. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
9. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
11. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Bidang Pertanahan

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan.

Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pertanahan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pertanahan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pertanahan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penatausahaan pertanahan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan pertanahan;
6. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pertanahan;
8. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pertanahan;
9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pertanahan;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pertanahan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

C. Bidang Tata Ruang

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang.

Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Tata Ruang;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penataan ruang;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Tata Ruang;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengaturan tata ruang;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan tata ruang;
6. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Tata Ruang;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Tata Ruang;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Tata Ruang;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Tata Ruang; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

D. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang.

Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
2. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengendalian pertanahan dan tata ruang;
7. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sebanyak 32 orang pegawai dengan rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.1 Data Pegawai Tahun 2025

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting				Keterisian Formasi
		Formasi		Formasi		Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Pria	Wanita	
A	**Jabatan Struktural**							
1	Kepala Dinas	1	S1, S2	1	S2	1		√
2	Sekretaris	1	S1, S2	1	S2		1	√
3	Kepala Bidang Pertanahan	1	S1, S2	1	S1	1		√
4	Kepala Bidang Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2	1		√
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	S1, S2	1	S2	1		√
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1, S2	1	S1		1	√
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1, S2	1	S1		1	√
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1, S2	1	S2		1	√
9	Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√
10	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√
11	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2		1	√
12	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2	1		√
13	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√
14	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2	1		√
B	**Jabatan Fungsional Tertentu**							
15	Penata Ruang Ahli Pertama	3	S1	3	S1	2	1	√
16	Pranata Komputer Terampil	1	D3	1	D3	1		√
17	Penata Layanan Operasional	1	S1	1	S1		1	√
C	**Jabatan Fungsional Umum**							
18	Penelaah Teknis Kebijakan	14	S1/D4	7	S2		1	50,00%
					S1	3	3	

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting				Keterisian Formasi
		Formasi		Formasi		Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Pria	Wanita	
19	Pengolah Data dan Informasi	19	D3	6	S1	1		31,58%
					D3		4	
					SMA	1		
20	Pengadministrasi Perkantoran	5	SMA/D 1	0	SMA		0	0%
		57		**32**		**14**	**18**	**56,14%**

Sumber: data per September 2025

Tabel 2.2 Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan			Kualifikasi				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Staff	IV	III	II	S2	S1	D3	SMA/ SMK	P	W
	PNS													
1	Jumlah	1	4	9	18	10	16	6	12	14	5	1	14	18
2	%	3,13	12,50	28,12	56,25	31,25	50,00	18,75	37,50	43,75	15,62	3,13	43,75	56,25

Sumber: data per September 2025

Seusai data di atas, jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada saat ini masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang ada.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional perangkat daerah. Data sarana dan prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah Barang
1	Tanah	5
2	Alat Besar	1
3	Kendaraan Roda Empat	5
4	Kendaraan Roda Dua	13
5	Sepeda	1
6	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	810
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18
9	Komputer dan Peralatan Komputer	144
10	Bangunan Gedung	6
11	Tugu Titik Kontrol/Pasti	701
12	Bahan Perpustakaan	159

No	Jenis	Jumlah Barang
13	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	11
14	Aset Tidak Berwujud	47
	Jumlah Aset	**1929**

Sumber: data per September 2025

Kondisi sarana prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dirasa cukup baik namun demikian masih diperlukan penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas sarana prasarana yang ada untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja dan meningkatkan kinerja organisasi.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
   Indikator kinerja: indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata Ruang.
2. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
   Indikator kinerja: indeks tertib administrasi pertanahan.
3. Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
   Indikator kinerja: Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Kinerja di atas didukung oleh kinerja program-program baik pada urusan bidang penataan ruang maupun urusan bidang pertanahan.

Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta juga diukur keberhasilannya dari pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026	
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Utama																	
1.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang					65,59	70,45	81,97			71,92	81,97			102,09%	100%		
	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang								84,84	87,90			87,23	89,08			102,82%	101,34%
2.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan					97,12	86,31	100,00	92,73	95,82	86,99	100,57	93,74	96,15	100,79%	100,57%	101,09%	100,34%
3.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat								A	A			AA	A			104,58%	100%
	Indikator Kinerja Program																	
4.	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang					72,00%	78,64%	88,48%	80,07%	83,89%	81,59%	88,48%	80,07%	85,79%	103,75%	100,00%	100,00%	102,26%
5.	Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang					56,50%												
	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang						62,25%	75,45%	89,61%	91,91%	62,25%	75,45%	93,45%	92,37%	100%	100%	104,29%	100,50%
6.	Persentase Penerbitan Izin Lokasi						100%	100%			100%	100%			100%	100%		
7.	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta						100%	100%			100%	100%			100%	100%		
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP								100%	100%			100%	100%			100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026	
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8.	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah					97,09%	99,02%	100%	100%	100%	99,02%	99,22%	100%	100%	100%	99%	100%	100%
9.	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot					97,13%	79,76%	100%			80,80%	101,26%			101,30%	101,26%		
	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot								85,45%	91,63%			87,49%	92,31%			102,39%	100,74%
10.	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan						93,33%				93,33%				100%			
11.	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara						75%	100%			90%	140%			120,00%	140,00%		
	Persentase permohonan surat rekomendasi yang diterbitkan sesuai SOP								100%				100%				100%	
	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP									100%				100%				100%
12.	Persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								81,22%	86,74%			81,22%	86,74%			100%	100%
13.	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								25%	42,03%			100%	49,57%			400%	117,94%
14.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)								A	A			A	A		100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022		Renstra 2023-2026	
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Kunci																	
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		√			-					-	-	80%	100%			80%	100%
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		√			100%					100%	100%	100%	100%			100%	100%
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		√			-					-	-	80%	31,376%			80%	31,376%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai atau bahkan melebihi target. Analisis terhadap capaian indikator kinerja Renstra 2023-2024 sebagai berikut:

1. Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

   Indikator ini digunakan untuk mengukur meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Dalam penghitungannya, menggunakan komponen indikator program yaitu persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dan persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang. Oleh karena itu, nilai indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang akan berubah apabila dua komponennya mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

   Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang selama tahun 2023-2024 terealisasi melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Kota Yogyakarta yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

   Sejak tahun 2021, Kota Yogyakarta telah memiliki acuan kebijakan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan secara berkelanjutan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan aturan turunan RTRW dan RDTR. Selama kurun waktu 2023-2024 Kota Yogyakarta telah berhasil menetapkan aturan penerapan peraturan zonasi dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan cagar budaya.

   Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta juga telah membangun dan terus mengembangkan sistem informasi tata ruang sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi seluas mungkin berupa ketentuan teknis tata ruang dalam Perwal RDTR. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan RTRW, RDTR, RTBL maupun aturan lainnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

   Dan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata ruang yang telah ditetapkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memberikan layanan telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi masyarakat/pemangku kepentingan yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang juga dilaksanakan diantaranya melalui audit tata ruang, pengawasan tata ruang, dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Indikator ini digunakan untuk mengukur meningkatnya tertib administrasi pertanahan. Dalam penghitungan indikatornya menggunakan komponen indikator program yaitu persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot dan persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah. Oleh karena itu, nilai indeks tertib administrasi pertanahan akan berubah apabila dua komponennya mengalami peningkatan atau penurunan.

Indeks tertib administrasi pertanahan selama tahun 2023-2024 terealisasi melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pertanahan pada Pemkot Yogyakarta telah berjalan semakin baik yang diwujudkan melalui peningkatan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta serta pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta sebanyak 960 bidang dan sebanyak 835 bidang telah terbit sertifikatnya. Semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang didaftarkan dan terbit sertifikatnya maka semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang memiliki legalitas dan kepastian hukum. Kemudian, sertifikat yang telah terbit dapat menjadi dasar pertimbangan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tanah tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan tanahnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan, atau tertib administrasinya.

3. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Indikator ini digunakan untuk mengukur meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*). Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) telah dapat tercapai sesuai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sudah berjalan dengan sangat baik.

Pada Renstra 2017-2022 maupun Renstra 2023-2026, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta belum menetapkan target terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja kunci yaitu tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal yang mengalami penurunan realisasi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendekatan metode dalam penghitungan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.283.515.400	Rp 6.143.619.150	Rp 5.996.589.881	Rp 5.828.465.398	95,43%	94,87%	-2,23%	-2,80%
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.091.801.000	Rp 1.979.062.000	Rp 2.061.629.630	Rp 1.961.650.367	98,56%	99,12%	-5,40%	-4,85%
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 145.722.000	Rp 122.025.100	Rp 137.806.850	Rp 116.478.500	94,57%	95,45%	-16,26%	-15,48%
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 1.567.496.000	Rp 2.683.148.000	Rp 1.543.314.940	Rp 2.330.952.550	98,46%	86,87%	71,17%	51,04%
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 532.811.500	Rp 492.988.500	Rp 503.268.660	Rp 475.844.320	94,46%	96,52%	-7,47%	-5,45%
6	Program Penatagunaan Tanah	Rp 166.673.000	Rp 78.622.000	Rp 163.640.280	Rp 73.299.000	98,18%	93,23%	-52,83%	-55,21%
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp 904.594.000	Rp 955.703.700	Rp 850.646.600	Rp 932.719.470	94,04%	97,60%	5,65%	9,65%
	Total	**Rp 11.692.612.900**	**Rp 12.455.168.450**	**Rp 11.256.896.841**	**Rp 11.719.409.605**	**96,27%**	**94,09%**	**6,52%**	**4,11%**

Komposisi terbesar anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta selain belanja gaji dan tunjangan adalah anggaran pada program dan kegiatan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Anggaran program/kegiatan untuk pengadaan tanah sangat fluktuatif dipengaruhi oleh kebutuhan pengadaan tanah tahun berjalan. Oleh karena itu realisasi keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, juga sangat dipengaruhi oleh realisasi keuangan pada program/kegiatan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketika penawaran harga tanah dari pemilik tanah melebihi harga hasil appraisal dan kemudian tidak tercapai kesepakatan harga antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemilik tanah, maka pembayaran untuk pembelian/pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan. Atau, ketika pemilik tanah sepakat terhadap harga appraisal yang nilainya di bawah harga penawaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, maka realisasi program/kegiatan pengadaan tanah menjadi tidak optimal. Hal inilah yang menyebabkan realisasi keuangan pada tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Meskipun demikian, selama tahun 2023-2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan deviasi keuangan di bawah 6% atau realisasi anggaran di atas 94%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan pada urusan penataan ruang dan pertanahan termasuk urusan keistimewaan dengan kelompok sasaran layanan diantaranya masyarakat, dunia usaha, institusi, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

Program	Kelompok Sasaran Layanan
Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Masyarakat, dunia usaha, Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Masyarakat dan institusi lainnya
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta
Program Penatagunaan Tanah	Masyarakat
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Masyarakat, institusi, dan Pemerintah Kota Yogyakarta

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah

Dalam pelaksanaan pemberian layanan dan pencapaian kinerjanya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai mitra, diantaranya:

1. Pelayanan urusan bidang penataan ruang, diantaranya:
   a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan bidang penataan ruang dilaksanakan dengan melibatkan OPD teknis Pemkot Yogyakarta seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Perhubungan, dan Bagian Hukum, kewilayahan, OPD teknis di tingkat Provinsi/pusat, akademisi, organisasi profesi maupun unsur masyarakat.
   b. Pembinaan tata ruang dalam bentuk sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang, dilaksanakan dengan melibatkan akademi, asosiasi profesi, dan praktisi di bidang tata ruang di Kota Yogyakarta.
   c. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan berbagai unsur pengampu kepentingan terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, DPUPKP, DPMPTSP, akademisi, organisasi profesi, maupun tokoh masyarakat.
   d. Penyiapan telaah teknis untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dilakukan secara online melalui perizinanonline.jogjakota.go.id, kolaborasi intensif dilaksanakan dengan DPMPTSP, DPUPKP, Diskominfosan terkait sistem, prosedur, maupun penanganan permasalahan pada proses pelayanan tersebut.
2. Pelayanan urusan bidang pertanahan, diantaranya:
   a. Pensertifikatan aset tanah Pemkot Yogyakarta, dilaksanakan dengan dukungan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
      Sejak tahun 2021 telah disepakati Kerjasama antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka percepatan pensertifikatan aset tanah Pemkot Yogyakarta.
   b. Pengadaan tanah aset Pemkot Yogyakarta, dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), wilayah/Kelurahan, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
   c. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten, dilaksanakan dengan melibatkan Karaton Ngayogyakarto Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, wilayah/Kelurahan, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan urusan pemerintahan,

tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta masih mengalami permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja organisasi, diantaranya:

a. Urusan Bidang Penataan Ruang
    1. Belum optimalnya pemenuhan aturan tata ruang

       Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang di dalamnya terdapat Pengaturan Zonasi (PZ) disusun mengikuti standarisasi dan pedoman Pemerintah Pusat sehingga membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal. Hal ini karena tidak semua sisi pengaturan tata ruang Kota Yogyakarta terakomodir di dalam pedoman dan standarisasi penyusunannya yang mendasar pada peraturan menteri ATR/BPN. Kota Yogyakarta memiliki wilayah perencanaan dan kekhasan yang sangat rigid dan rinci dengan berbagai karakter kawasan yang terbentuk yang masing-masing tidak dapat disamaratakan dari sisi pengaturannya. Keruangan Kota Yogyakarta yang sudah terbentuk kurang lebih 200 tahun yang lalu lebih cenderung ditata dari sisi pengendalian pemanfaatan ruangnya supaya tidak semakin semrawut dan mix used dari sisi fungsi kawasannya. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengembangan kotanya diperlukan kebijakan, strategi dan pengaturan secara komprehensif dan rinci.
    2. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta.

       Dari tahun ke tahun persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 telah mencapai 85,26%, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.21 tahun 2021 masuk dalam klasifikasi sudah terwujud (diatas 85%). Kesesuaian pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh unsur pemenuhan kebijakan tata ruang, pemahaman masyarakat terkait tata ruang, serta ketaatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Persentase kesesuaian tata ruang dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Hal tersebut memerlukan dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
b. Urusan Bidang Pertanahan
    1. Banyaknya aset tanah berupa ruas jalan yang belum bersertifikat hak pakai Pemerintah Kota Yogyakarta.

       Aset tanah berupa ruas - ruas jalan di Kota Yogyakarta belum seluruhnya bersertifikat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti ketidakjelasan status bidang tanah yang dimanfaatkan sebagai jalan yang dapat mengakibatkan adanya sengketa atau perselisihan atas tanah tersebut. Selain itu kegiatan pemeliharaan ruas jalan menjadi kurang optimal karena terkendala status alas hak atas tanah. Terhadap persoalan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil sikap untuk secara

konsisten dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih status kepemilikan tanah pada ruas jalan sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan dan kendala dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta terwujudnya kepastian hukum atas status tanah jalan.

2. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk fasilitas umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta

   Terbatasnya ketersediaan aset tanah antara lain untuk kebutuhan pembangunan sarana prasarana perkantoran, ruang terbuka hijau publik, dan balai pertemuan masyarakat di Kota Yogyakarta menyebabkan belum dapat optimalnya pemenuhan standar sarana prasarana dan standar layanan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penyediaan lahan untuk penyediaan fasilitas umum melalui mekanisme pengadaan tanah Pemerintah.

3. Belum tertibnya administrasi pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan dan tanah kadipaten

   Masih terdapat kegiatan pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum berijin. Hal ini disebabkan belum jelasnya status tanah yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sehingga masyarakat belum melakukan tertib administrasi dalam bentuk pengurusan perizinan dalam pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Sebagai upaya membantu masyarakat dalam pemenuhan tertib administrasi pemanfaatan tanah maka perlu kebijakan dan langkah strategis untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, verifikasi dan pendaftaran terhadap tanah Negara, tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di wilayah Kota Yogyakarta guna terwujudnya kepastian hukum terhadap status tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

a. Urusan Bidang Penataan Ruang

   1. Pemenuhan kebutuhan kebijakan dan pedoman teknis tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan

      Untuk mengoptimalkan pengembangan kota diperlukan kebijakan, strategi dan pengaturan secara komprehensif, teknis, dan rinci. Kebijakan dan pedoman teknis perlu disusun untuk lebih mendetailkan RDTR dan Pengaturan Zonasi terutama untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki karekteristik pengaturan tersendiri dengan mempertimbangkan karekteristik kawasan. Selain itu pengaturan pada kawasan-kawasan prioritas pada wilayah yang dikehendaki dapat dilakukan sesuai dengan

kekhasan yang lebih rigid dan rinci sehingga terpenuhi kebutuhan kabijakan yang berkualitas dan berkelanjutan

2. Respon terhadap dinamika pengaturan tata ruang di tingkat pusat maupun propinsi

   Beberapa peraturan dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun propinsi terbit setelah ditetapkannnya RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta tahun 2021. Dari pencermatan yang telah dilakukan, beberapa peraturan tersebut tidak sinkron dengan ketentuan tata ruang yang telah diatur dalam RTRW maupun RDTR Kota Yogyakarta. Mempertimbangkan hal tersebut dan mempertimbangkan bahwa RTRW dan RDTR tersebut sudah mendekati periode 5 tahun, maka peninjauan kembali terhadap RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan dan dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.

3. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan tata ruang.

   Ketentuan tata ruang yang sudah disusun melalui pengaturan tata ruang, hendaknya dapat diketahui, dimengerti serta dipahami oleh masyarakat secara luas. Hal ini sebagai upaya agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan tata ruang akan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta. Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan tata ruang melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, penyebarluasan informasi, pengelolaan sistem informasi serta pelayanan informasi tata ruang.

4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta

   Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menerapkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berupa penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan ruang, audit tata ruang, dan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif tata ruang. Pelaksanaaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang akan melibatkan pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah.

b. Urusan Bidang Pertanahan

1. Pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa ruas jalan

   Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang telah menjadi aset Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, agar seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta dapat secara optimal dilakukan pembangunan pemeliharaan maka perlu dilakukan upaya

berkelanjutan melalui kegiatan pensertifikatan ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta

2. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

   Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkantoran guna mewujudkan standar sarana prasarana kantor, ruang terbuka hijau publik dan balai pertemuan masyarakat membutuhkan ketersediaan aset berupa tanah untuk penyediaan infrastruktur tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut adalah dengan cara pembelian tanah secara bertahap dan berkelanjutan melalui mekanisme pengadaan tanah pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tertib administrasi pemanfaatan tanah Negara, tanah Kasultanan dan Kadipaten.

   Kondisi wilayah perkotaan Yogyakarta dengan luas 32,8 km^2 dengan kepadatan permukiman penduduk yang menempati lahan-lahan yang bukan miliknya dan berlangsung lama, menyebabkan warga mengalami hambatan dalam melakukan proses perizinan dan tertib administrasi pemanfaatan tanah karena belum jelasnya status tanah yang dimanfaatakan oleh warga. Guna membantu mewujudkan tertib administrasi pemanfaatan tanah oleh warga masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, verifikasi dan pendaftaran terhadap tanah Negara, tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di wilayah Kota Yogyakarta agar terwujud kepastian hukum terhadap status tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perumusan isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Tersedianya aturan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041	Belum optimalnya pemenuhan aturan tata ruang	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah Kurangnya ruang terbuka hijau publik	Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan berketahanan lingkungan	Dinamika perkembangan aglomerasi perkotaan regional	Pemenuhan kebutuhan kebijakan dan pedoman teknis tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan Respon terhadap dinamika pengaturan tata ruang di tingkat pusat maupun propinsi
2	Tersedianya aturan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, dan aturan turunannya	Belum optimalnya Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta	Kurangnya ruang terbuka hijau publik	Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan berketahanan lingkungan	Dinamika perkembangan aglomerasi perkotaan regional	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta Peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan tata ruang
3	Berdasarkan data Kajian Evaluasi Pemanfaatatan Ruang 2024, luas jalan di kota yogyakarta mencapai 11,95% dari luas kota Yogyakarta	Banyaknya aset tanah berupa ruas jalan yang belum bersertifikat hak pakai Pemerintah Kota Yogyakarta	Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan berketahanan lingkungan	Dinamika perkembangan aglomerasi perkotaan regional	Pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa ruas jalan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Ketersediaan lokasi pemenuhan kebutuhan tanah untuk fasilitas umum	Meningkatnya kebutuhan tanah untuk fasilitas umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Kurangnya ruang terbuka hijau publik	Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan berketahanan lingkungan	Implementasi pengelolaan satuan ruang strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Pengadaan tanah untuk fasilitas umum milik Pemerintah Kota Yogyakart
5	Keberadaan tanah negara, tanah kasultanan, dan tanah kadipaten	Belum tertibnya administrasi pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Disrupsi informasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan yang meningkat	Ketmpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan budaya di perkotaan	Implementasi pengelolaan satuan ruang strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pemanfaatan tanah Negara, tanah Kasultanan dan Kadipaten

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" dan Misi "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari", "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, dan UUD 1945" serta "Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY".

Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan" serta "Terwujudnya tata pemerintahan dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY" dan sasaran "Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana" serta "Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan" dengan indikator sasaran "Indeks keterpaduan pembangunan infrastruktur" dan "Nilai AKIP".

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada periode Renstra tahun 2025-2029 adalah:

a. **Terwujudnya penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang berkualitas**

   Target yang akan dicapai adalah dari 73,11% di tahun 2025 menjadi 85,15% di tahun 2029.

   Indikator: Persentase kualitas penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan

   Formula indikator: (persentase kualitas penataan ruang + persentase tertib administrasi pertanahan) dibagi 2

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada periode Renstra tahun 2025-2029 adalah:

a. **Meningkatnya kualitas penataan ruang**

Target yang akan dicapai adalah dari 76,03% di tahun 2025 menjadi 89,31% di tahun 2029.

Indikator: Persentase kualitas penataan ruang

Formula indikator: 25% persentase pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang + 25% persentase ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan tata ruang + 50% persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

b. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Target yang akan dicapai adalah dari 70,20% di tahun 2025 menjadi 80,99% di tahun 2029.

Indikator: Persentase tertib administrasi pertanahan

Formula indikator: 15% persentase tertib administrasi pengadaan tanah + 15% persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot + 15% persentase pemanfaatan tanah negara sesuai rekomendasi + 15% persentase permasalahan pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP + 10% persentase pensertifikatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten + 10% persentase pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten + 10% persentase pengawasan kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten + 10% persentase permasalahan tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP

c. Meningkatnya tata kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang baik dan adaptif

Target yang akan dicapai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah nilai A.

Indikator: Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Formula indikator: Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta periode 2025–2029 beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Terwujudnya Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang berkualitas		Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan (Persentase)	N/A	73,11	76,42	79,55	82,21	85,15	88,07	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Kualitas Penataan Ruang (Persentase)	N/A	76,03	79,35	82,67	85,99	89,31	92,63	
Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (Persentase)	N/A	70,20	73,49	76,43	78,43	80,99	83,50	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara bertahap dan berkelanjutan serta tetap berada pada koridor.

3.2.1. Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langka atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa tahapan dan lokus Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penguatan Dasar dan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan	Akselerasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan

1. Penguatan dasar dan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan

   Fokus pada penyiapan dasar penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, serta penganggaran. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas, SDM yang berkualitas, sarana prasarana yang mendukung, serta oleh sistem yang telah terbangun serta ketersediaan anggaran maka penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan akan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan penataan ruang dan pertanahan

   Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan kualitas layanan penataan Ruang dan pertanahan bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan ditujukanuntuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi dan

digitalisasi layanan akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi.

3. Akselerasi penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan

   Fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode yang telah berjalan. Terhadap pelaksanaan maupun capaian program/kegiatan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan.

4. Penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang terintegrasi dan berkelanjutan

   Pada tahap ini, integrasi program/kegiatan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan terlaksana secara berkesinambungan, terintegrasi, terkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan.

5. Penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan

   Fokus pada tahap ini adalah pada penyelesaian seluruh program/kegiatan untuk memastikan target tercapai. Tahap ini merupakan tahap proses konsolidasi kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai penyelenggaraan penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang berkualitas. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian tahap berikutnya.

Lokus Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta untuk mendorong terwujudnya penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan yang berkualitas di Kota Yogyakarta.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah dan kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Tujuan			
1	Terwujudnya Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang berkualitas			
	Sasaran			
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Meningkatkan pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup serta perubahan iklim	Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dokumen tata ruang	
			Melaksanakan penyusunan dokumen tata ruang	
			Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang	
			Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan tata ruang	
		Meningkatkan Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Melaksanakan pemberian informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	
			Melaksanakan pengelolaan sistem informasi tata ruang	
		Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang	
			Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang	
1.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatkan Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk pembangunan	
		Meningkatkan Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan	Melaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Melaksanakan pemberian rekomendasi pemanfaatan tanah negara	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian penanganan permasalahan pertanahan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Melaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
			Melaksanakan pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
			Melaksanakan pengawasan pemanfaatkan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
			Melaksanakan fasilitasi penyelesaian penanganan permasalahan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
			Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (Pertanahan)	
			Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2030.

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2030 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 19 (sembilan belas) rumusan kegiatan, dan 60 (enam puluh) rumusan subkegiatan.

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan salah satu program pada urusan tata ruang. Indikator dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu persentase pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang, persentase ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan tata ruang, dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

      Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pengaturan tata ruang, dengan indikator kinerja persentase pengaturan tata ruang, yang terdiri dari 4 subkegiatan sebagai berikut:

      1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
      2) Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
      3) Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
      4) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya perencanaan tata ruang, dengan indikator kinerja persentase perencanaan tata ruang, yang terdiri dari 3 subkegiatan sebagai berikut:

   1) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
   2) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
   3) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pelaksanaan pembinaan tata ruang, dengan indikator kinerja persentase pembinaan tata ruang, yang terdiri dari 2 subkegiatan sebagai berikut:

   1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
   2) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, dengan indikator kinerja persentase pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri dari 6 subkegiatan sebagai berikut:

   1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang
   2) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
   3) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
   4) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
   5) Penilaian Perwujudan RTR
   6) Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

   Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan merupakan salah satu program pada urusan pertanahan. Indikator pada program ini yaitu persentase permasalahan pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

      Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya fasilitasi penyelesaian penanganan permasalahan pertanahan, dengan indikator kinerja persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi, yang terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut:

      1) Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan merupakan salah satu program pada urusan pertanahan. Indikator pada program ini yaitu persentase tertib administrasi pengadaan tanah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya pelepasan hak atas tanah, dengan indikator kinerja persentase pelepasan hak atas tanah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut:

   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Tanah Kosong

   Program Pengelolaan Tanah Kosong merupakan salah satu program pada urusan pertanahan. Indikator pada program ini yaitu persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

      Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot, dengan indikator kinerja persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot, yang terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut:

      1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

5. Program Penatagunaan Tanah

   Program Penatagunaan Tanah merupakan salah satu program pada urusan pertanahan dengan indikator kinerja meningkatnya tertib administrasi pemanfaatan tanah negara. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

      Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pelayanan pemanfaatan tanah negara dengan indikator kinerja persentase rekomendasi pemanfaatan tanah negara untuk in gang yang diterbitkan sesuai SOP, yang terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut:

      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan merupakan salah satu program pada urusan pertanahan dengan indikator kinerja yaitu persentase pensertifikatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, persentase pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, persentase

pengawasan kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dan persentase permasalahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Pertanahan dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 subkegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pendaftaran pensertifikatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan indikator kinerja persentase pendaftaran pensertifikatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dan meningkatnya pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan indikator kinerja persentase pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut:

   1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   2) Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan indikator kinerja persentase rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang diterbikan sesuai SOP, dan meningkatnya fasilitasi penyelesaian penanganan permasalahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan indikator kinerja persentase permasalahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang terfasilitasi. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan sebagai berikut:

   1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
   2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan

   Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (Pertanahan) dengan indikator kinerja persentase penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (Pertanahan), yang terdiri dari 1 subkegiatan sebagai berikut:

   1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 36 subkegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinpertaru dan persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 7 subkegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator nilai penguatan keuangan dan aset Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 8 subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator nilai penguatan keuangan dan aset Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 6 subkegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator nilai indeks profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 6 subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator nilai penguatan keuangan dan aset Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator persentase pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan indikator nilai penguatan keuangan dan aset Dinpertaru. Kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Cascading dari tujuan, sasaran, program hingga subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Sedangkan rencana program dan kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2030 disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Terwujudnya Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkualitas				Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan		
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang			Persentase Kualitas Penataan Ruang		
			Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang		Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Pengaturan Tata Ruang	Persentase Pengaturan Tata Ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang		Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Pembinaan Tata Ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan			Persentase Tertib Administrasi Pertanahan		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan		Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah		Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Pelepasan Hak Atas Tanah	Persentase Pelepasan Hak atas Tanah	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan		Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
					Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara		Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya pelayanan pemanfaatan tanah negara	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	
					Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		
					Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		
					Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP		
				Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	
				Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterbitkan sesuai SOP	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
				Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Terfasilitasi	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)		Nilai SAKIP Dinpertaru	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinpertaru		
					Nilai IKM Dinpertaru		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Persentase Ketepatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinpertaru Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral Dinpertaru	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinpertaru	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				7.954.099.150,00		7.963.445.900,00		8.125.417.112,00		8.331.655.316,00		8.558.156.739,00		8.852.860.287,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.218.001.400,00		5.744.477.100,00		5.861.315.957,00		6.010.087.061,00		6.173.475.154,00		6.386.061.239,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai SPIP Dinpertaru (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	6.218.001.400,00	Terkelola dan Terukur	5.744.477.100,00	Terkelola dan Terukur	5.861.315.957,00	Terkelola dan Terukur	6.010.087.061,00	Terkelola dan Terukur	6.173.475.154,00	Terkelola dan Terukur	6.386.061.239,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	Nilai IKM Dinpertaru (Nilai)	85,33	85,35		85,37		85,39		85,41		85,43		85,45			
	Nilai SAKIP Dinpertaru (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.802.000,00		25.064.000,00		25.573.778,00		26.222.892,00		26.935.760,00		27.863.427,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru (Persentase)	100	100	22.802.000,00	100	25.064.000,00	100	25.573.778,00	100	26.222.892,00	100	26.935.760,00	100	27.863.427,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru (Persentase)	-	100		100		100		100		100		100			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.670.000,00		7.754.000,00		7.911.709,00		8.112.524,00		8.333.063,00		8.620.053,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7.670.000,00	3	7.754.000,00	3	7.911.709,00	3	8.112.524,00	3	8.333.063,00	3	8.620.053,00		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.482.000,00		1.710.000,00		1.744.780,00		1.789.066,00		1.837.701,00		1.900.992,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.482.000,00	1	1.710.000,00	1	1.744.780,00	1	1.789.066,00	1	1.837.701,00	1	1.900.992,00		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.196.000,00		1.710.000,00		1.744.780,00		1.789.066,00		1.837.701,00		1.900.992,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.196.000,00	1	1.710.000,00	1	1.744.780,00	1	1.789.066,00	1	1.837.701,00	1	1.900.992,00		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				598.000,00		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.067,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	598.000,00	1	690.000,00	1	704.034,00	1	721.904,00	1	741.529,00	1	767.067,00		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				598.000,00		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.067,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	598.000,00	1	690.000,00	1	704.034,00	1	721.904,00	1	741.529,00	1	767.067,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.660.000,00		11.820.000,00		12.060.407,00		12.366.524,00		12.702.708,00		13.140.189,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	25	10.660.000,00	24	11.820.000,00	24	12.060.407,00	24	12.366.524,00	24	12.702.708,00	24	13.140.189,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				598.000,00		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.067,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	598.000,00	1	690.000,00	1	704.034,00	1	721.904,00	1	741.529,00	1	767.067,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.503.041.000,00		4.966.381.000,00		5.067.392.223,00		5.196.012.771,00		5.337.292.027,00		5.521.108.365,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru (Nilai)	5	5	5.503.041.000,00	5	4.966.381.000,00	5	5.067.392.223,00	5	5.196.012.771,00	5	5.337.292.027,00	5	5.521.108.365,00		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.449.987.000,00		4.902.947.000,00		5.002.668.039,00		5.129.645.759,00		5.269.120.827,00		5.450.589.349,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33	5.449.987.000,00	33	4.902.947.000,00	33	5.002.668.039,00	33	5.129.645.759,00	33	5.269.120.827,00	33	5.450.589.349,00		
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.870.000,00		4.600.000,00		4.693.559,00		4.812.691,00		4.943.524,00		5.113.779,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.870.000,00	1	4.600.000,00	1	4.693.559,00	1	4.812.691,00	1	4.943.524,00	1	5.113.779,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.870.000,00		4.600.000,00		4.693.559,00		4.812.691,00		4.943.524,00		5.113.779,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	1.870.000,00	2	4.600.000,00	2	4.693.559,00	2	4.812.691,00	2	4.943.524,00	2	5.113.779,00		
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.910.000,00		4.600.000,00		4.693.559,00		4.812.691,00		4.943.524,00		5.113.779,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	3.910.000,00	12	4.600.000,00	12	4.693.559,00	12	4.812.691,00	12	4.943.524,00	12	5.113.779,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.482.000,00		1.710.000,00		1.744.780,00		1.789.066,00		1.837.701,00		1.900.992,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.482.000,00	1	1.710.000,00	1	1.744.780,00	1	1.789.066,00	1	1.837.701,00	1	1.900.992,00		
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.196.000,00		2.040.000,00		2.081.492,00		2.134.324,00		2.192.346,00		2.267.850,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1.196.000,00	1	2.040.000,00	1	2.081.492,00	1	2.134.324,00	1	2.192.346,00	1	2.267.850,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				42.148.000,00		45.204.000,00		46.123.404,00		47.294.108,00		48.579.799,00		50.252.887,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	42.148.000,00	12	45.204.000,00	12	46.123.404,00	12	47.294.108,00	12	48.579.799,00	12	50.252.887,00		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				578.000,00		680.000,00		693.831,00		711.441,00		730.782,00		755.950,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	578.000,00	1	680.000,00	1	693.831,00	1	711.441,00	1	730.782,00	1	755.950,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.588.000,00		23.400.000,00		23.875.933,00		24.481.952,00		25.147.493,00		26.013.574,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru (Nilai)	5	5	3.588.000,00	5	23.400.000,00	5	23.875.933,00	5	24.481.952,00	5	25.147.493,00	5	26.013.574,00		
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				575.000,00		3.390.000,00		3.458.949,00		3.546.744,00		3.643.163,00		3.768.633,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	575.000,00	1	3.390.000,00	1	3.458.949,00	1	3.546.744,00	1	3.643.163,00	1	3.768.633,00		
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				660.000,00		2.730.000,00		2.785.525,00		2.856.228,00		2.933.874,00		3.034.917,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	660.000,00	1	2.730.000,00	1	2.785.525,00	1	2.856.228,00	1	2.933.874,00	1	3.034.917,00		
1.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				330.000,00		4.825.000,00		4.923.136,00		5.048.095,00		5.185.327,00		5.363.910,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	330.000,00	1	4.825.000,00	1	4.923.136,00	1	5.048.095,00	1	5.185.327,00	1	5.363.910,00		
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				850.000,00		5.975.000,00		6.096.526,00		6.251.268,00		6.421.208,00		6.642.355,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	850.000,00	12	5.975.000,00	12	6.096.526,00	12	6.251.268,00	12	6.421.208,00	12	6.642.355,00		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				391.000,00		5.100.000,00		5.203.729,00		5.335.810,00		5.480.864,00		5.669.625,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	391.000,00	1	5.100.000,00	1	5.203.729,00	1	5.335.810,00	1	5.480.864,00	1	5.669.625,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				782.000,00		1.380.000,00		1.408.068,00		1.443.807,00		1.483.057,00		1.534.134,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	782.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.068,00	1	1.443.807,00	1	1.483.057,00	1	1.534.134,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.795.000,00		4.892.526,00		5.016.708,00		5.153.087,00		5.330.559,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru (Nilai)	84,84	84,85	1.610.000,00	84,86	4.795.000,00	84,87	4.892.526,00	84,88	5.016.708,00	84,89	5.153.087,00	84,90	5.330.559,00		
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.610.000,00		4.795.000,00		4.892.526,00		5.016.708,00		5.153.087,00		5.330.559,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.610.000,00	1	4.795.000,00	1	4.892.526,00	1	5.016.708,00	1	5.153.087,00	1	5.330.559,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				103.083.700,00		108.089.500,00		115.287.932,00		113.087.262,00		121.161.539,00		120.162.141,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru (Nilai)	89,96	89,97	103.083.700,00	89,98	108.089.500,00	89,99	115.287.932,00	90,00	113.087.262,00	90,01	121.161.539,00	90,02	120.162.141,00		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		-		5.000.000,00		-		5.000.000,00		-		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	-	-	-	1	5.000.000,00	-	-	1	5.000.000,00	-	-		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.573.700,00		9.634.500,00		9.830.456,00		10.079.973,00		10.353.997,00		10.710.588,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	9.573.700,00	1	9.634.500,00	1	9.830.456,00	1	10.079.973,00	1	10.353.997,00	1	10.710.588,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.630.000,00		6.900.000,00		7.040.339,00		7.219.037,00		7.415.287,00		7.670.669,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	6.630.000,00	1	6.900.000,00	1	7.040.339,00	1	7.219.037,00	1	7.415.287,00	1	7.670.669,00		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.240.000,00		3.240.000,00		3.305.898,00		3.389.809,00		3.481.961,00		3.601.879,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.240.000,00	1	3.240.000,00	1	3.305.898,00	1	3.389.809,00	1	3.481.961,00	1	3.601.879,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.280.000,00		80.080.000,00		81.708.747,00		83.782.679,00		86.060.311,00		89.024.228,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86	53	82.280.000,00	26	80.080.000,00	26	81.708.747,00	26	83.782.679,00	26	86.060.311,00	26	89.024.228,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.360.000,00		8.235.000,00		8.402.492,00		8.615.764,00		8.849.983,00		9.154.777,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.360.000,00	1	8.235.000,00	1	8.402.492,00	1	8.615.764,00	1	8.849.983,00	1	9.154.777,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.412.900,00		117.550.000,00		119.940.849,00		122.985.188,00		126.328.540,00		130.679.295,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru (Nilai)	5	5	62.412.900,00	5	117.550.000,00	5	119.940.849,00	5	122.985.188,00	5	126.328.540,00	5	130.679.295,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.412.900,00		117.550.000,00		119.940.849,00		122.985.188,00		126.328.540,00		130.679.295,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	51	6	62.412.900,00	8	117.550.000,00	8	119.940.849,00	8	122.985.188,00	8	126.328.540,00	8	130.679.295,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.924.600,00		200.660.600,00		204.741.836,00		209.938.593,00		215.645.775,00		223.072.614,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru (Persentase)	100	100	197924600	100	200.660.600,00	100	204.741.836,00	100	209.938.593,00	100	215.645.775,00	100	223.072.614,00		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.061.017,00		3.138.712,00		3.224.038,00		3.335.073,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.061.017,00	2	3.138.712,00	2	3.224.038,00	2	3.335.073,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.200.000,00		4.200.000,00		4.285.424,00		4.394.196,00		4.513.653,00		4.669.103,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.200.000,00	12	4.200.000,00	12	4.285.424,00	12	4.394.196,00	12	4.513.653,00	12	4.669.103,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.724.600,00		193.460.600,00		197.395.395,00		202.405.685,00		207.908.084,00		215.068.438,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	190.724.600,00	12	193.460.600,00	12	197.395.395,00	12	202.405.685,00	12	207.908.084,00	12	215.068.438,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.539.200,00		298.537.000,00		299.610.880,00		312.341.695,00		315.810.933,00		331.831.264,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru (Nilai)	5	5	323.539.200,00	5	298.537.000,00	5	299.610.880,00	5	312.341.695,00	5	315.810.933,00	5	331.831.264,00		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.886.000,00		26.440.000,00		26.977.763,00		27.662.513,00		28.414.518,00		29.393.114,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	24.886.000,00	1	26.440.000,00	1	26.977.763,00	1	27.662.513,00	1	28.414.518,00	1	29.393.114,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.291.700,00		119.302.000,00		116.730.420,00		124.819.365,00		123.190.807,00		132.577.299,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	16	110.291.700,00	16	119.302.000,00	16	116.730.420,00	16	124.819.365,00	16	123.190.807,00	16	132.577.299,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.361.500,00		51.315.000,00		52.358.696,00		53.687.664,00		55.147.163,00		57.046.432,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	50	43.361.500,00	50	51.315.000,00	50	52.358.696,00	50	53.687.664,00	50	55.147.163,00	50	57.046.432,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				145.000.000,00		101.480.000,00		103.544.001,00		106.172.153,00		109.058.445,00		112.814.419,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	145.000.000,00	1	101.480.000,00	1	103.544.001,00	1	106.172.153,00	1	109.058.445,00	1	112.814.419,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.736.097.750,00		2.218.968.800,00		2.264.101.155,00		2.321.568.255,00		2.384.681.585,00		2.466.799.048,00		
Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (Persentase)	-	68,75		75	1.039.244.000,00	81,25	1.260.382.222,00	87,5	1.237.296.213,00	93,75	1.188.592.459,00	100	1.229.516.611,00		
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				653.945.750,00		626.436.000,00		954.717.852,00		978.949.870,00		823.221.679,00		851.562.462,00		
Meningkatnya Pengaturan Tata Ruang	Persentase Pengaturan Tata Ruang (Persentase)	-	76,19	-	80,95	626.436.000,00	85,71	954.717.852,00	90,48	978.949.870,00	95,24	823.221.679,00	100	851.562.462,00		
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				404.730.000,00		413.492.000,00		421.902.427,00		432.611.155,00		594.373.852,00		614.833.116,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	404.730.000,00	3	413.492.000,00	2	421.902.427,00	2	432.611.155,00	2	594.373.852,00	2	614.833.116,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				-		-		-		323.548.553,00		-		-		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	1	323.548.553,00	-	-	-	-		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				-		-		315.540.144,00		-		-		-		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	315.540.144,00	-	-	-	-	-	-		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				249.215.750,00		212.944.000,00		217.275.281,00		222.790.162,00		228.847.827,00		236.729.346,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	-	3	249.215.750,00	3	212.944.000,00	3	217.275.281,00	3	222.790.162,00	3	228.847.827,00	3	236.729.346,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				204.125.000,00		412.808.000,00		305.664.370,00		258.346.343,00		365.370.780,00		377.954.149,00		
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang (Persentase)	-	77,27	204.125.000,00	81,82	412.808.000,00	86,36	305.664.370,00	90,91	258.346.343,00	95,45	365.370.780,00	100	377.954.149,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				-		-		200.000.000,00		-		-		-		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				-		309.250.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	1	309.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				204.125.000,00		103.558.000,00		105.664.370,00		258.346.343,00		365.370.780,00		377.954.149,00		
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	3	2	204.125.000,00	1	103.558.000,00	1	105.664.370,00	1	258.346.343,00	1	365.370.780,00	1	377.954.149,00		
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (Persentase)	-	64,84		71,87	633.534.000,00	78,9	446.418.611,00	85,93	512.826.324,00	92,97	609.105.800,00	100	630.083.404,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				319.844.000,00		633.534.000,00		446.418.611,00		512.826.324,00		609.105.800,00		630.083.404,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Pembinaan Tata Ruang (Persentase)	-	82,42	319.844.000,00	85,93	633.534.000,00	89,45	446.418.611,00	92,97	512.826.324,00	96,48	609.105.800,00	100	630.083.404,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				86.172.000,00		91.132.000,00		92.985.625,00		95.345.786,00		97.938.238,00		101.311.231,00		
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1000	1250	86.172.000,00	1000	91.132.000,00	1000	92.985.625,00	1000	95.345.786,00	1000	97.938.238,00	1000	101.311.231,00		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				233.672.000,00		542.402.000,00		353.432.986,00		417.480.538,00		511.167.562,00		528.772.173,00		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	233.672.000,00	1	542.402.000,00	1	353.432.986,00	1	417.480.538,00	1	511.167.562,00	1	528.772.173,00		
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Persentase)	85,260	85,261	558.183.000,00	85,262	546.190.800,00	85,263	557.300.322,00	85,264	571.445.718,00	85,265	586.983.326,00	85,266	607.199.033,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				558.183.000,00		546.190.800,00		557.300.322,00		571.445.718,00		586.983.326,00		607.199.033,00		
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Persentase)	100	100	558.183.000,00	100	546.190.800,00	100	557.300.322,00	100	571.445.718,00	100	586.983.326,00	100	607.199.033,00		
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				47.531.600,00		47.531.600,00		48.498.393,00		49.729.379,00		51.081.521,00		52.840.768,00		
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1	1	47.531.600,00	1	47.531.600,00	1	48.498.393,00	1	49.729.379,00	1	51.081.521,00	1	52.840.768,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				87.487.400,00		87.487.400,00		89.266.894,00		91.532.666,00		94.021.439,00		97.259.538,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	-	1	87.487.400,00	1	87.487.400,00	1	89.266.894,00	1	91.532.666,00	1	94.021.439,00	1	97.259.538,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				32.845.400,00		34.720.400,00		35.426.613,00		36.325.811,00		37.313.510,00		38.598.587,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1	1	32.845.400,00	1	34.720.400,00	1	35.426.613,00	1	36.325.811,00	1	37.313.510,00	1	38.598.587,00		
1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				155.405.600,00		158.108.400,00		161.324.325,00		165.419.059,00		169.916.803,00		175.768.738,00		
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	3	2	155.405.600,00	2	158.108.400,00	2	161.324.325,00	2	165.419.059,00	2	169.916.803,00	2	175.768.738,00		
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				192.693.000,00		173.843.000,00		177.378.967,00		181.881.200,00		186.826.549,00		193.260.856,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	-	1	192.693.000,00	1	173.843.000,00	1	177.378.967,00	1	181.881.200,00	1	186.826.549,00	1	193.260.856,00		
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				42.220.000,00		44.500.000,00		45.405.130,00		46.557.603,00		47.823.504,00		49.470.546,00		
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1	1	42.220.000,00	1	44.500.000,00	1	45.405.130,00	1	46.557.603,00	1	47.823.504,00	1	49.470.546,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				3.123.018.850,00		7.253.890.000,00		7.519.751.194,00		7.703.300.994,00		7.904.464.459,00		8.164.802.469,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				87.816.000,00		89.816.000,00		91.642.798,00		93.968.863,00		96.523.467,00		99.847.291,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Persentase)	100	100	87.816.000,00	100	89.816.000,00	100	91.642.798,00	100	93.968.863,00	100	96.523.467,00	100	99.847.291,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				87.816.000,00		89.816.000,00		91.642.798,00		93.968.863,00		96.523.467,00		99.847.291,00		
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi (Persentase)	100	100	87.816.000,00	100	89.816.000,00	100	91.642.798,00	100	93.968.863,00	100	96.523.467,00	100	99.847.291,00		
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				87.816.000,00		89.816.000,00		91.642.798,00		93.968.863,00		96.523.467,00		99.847.291,00		
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	87.816.000,00	2	89.816.000,00	2	91.642.798,00	2	93.968.863,00	2	96.523.467,00	2	99.847.291,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				1.482.845.000,00		6.132.322.000,00		6.257.049.366,00		6.415.864.920,00		6.590.284.345,00		6.817.223.421,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah (Persentase)	-	83,58	1.482.845.000,00	83,82	6.132.322.000,00	84,06	6.257.049.366,00	84,29	6.415.864.920,00	84,51	6.590.284.345,00	84,72	6.817.223.421,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.482.845.000,00		6.132.322.000,00		6.257.049.366,00		6.415.864.920,00		6.590.284.345,00		6.817.223.421,00		
Terlaksananya Pelepasan Hak Atas Tanah	Persentase Pelepasan Hak atas Tanah (Persentase)	100	100	1.482.845.000,00	100	6.132.322.000,00	100	6.257.049.366,00	100	6.415.864.920,00	100	6.590.284.345,00	100	6.817.223.421,00		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.482.845.000,00		6.132.322.000,00		6.257.049.366,00		6.415.864.920,00		6.590.284.345,00		6.817.223.421,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	1.482.845.000,00	3	6.132.322.000,00	2	6.257.049.366,00	2	6.415.864.920,00	2	6.590.284.345,00	2	6.817.223.421,00		
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				728.283.600,00		561.904.000,00		573.332.755,00		587.885.007,00		603.867.040,00		624.661.443,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (Persentase)	-	80,44	728.283.600,00	82,43	561.904.000,00	82,81	573.332.755,00	83,19	587.885.007,00	83,48	603.867.040,00	83,76	624.661.443,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				728.283.600,00		561.904.000,00		573.332.755,00		587.885.007,00		603.867.040,00		624.661.443,00		
Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (Persentase)	-	97,34	728.283.600,00	98,39	561.904.000,00	98,77	573.332.755,00	99,15	587.885.007,00	99,53	603.867.040,00	99,81	624.661.443,00		
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				728.283.600,00		561.904.000,00		573.332.755,00		587.885.007,00		603.867.040,00		624.661.443,00		
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	7	6	728.283.600,00	7	561.904.000,00	6	573.332.755,00	6	587.885.007,00	6	603.867.040,00	6	624.661.443,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				244.645.000,00		119.658.500,00		122.092.275,00		125.191.204,00		128.594.607,00		133.022.814,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi (Persentase)	-	6	244.645.000,00	12	119.658.500,00	18	122.092.275,00	20	125.191.204,00	26	128.594.607,00	32	133.022.814,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				244.645.000,00		119.658.500,00		122.092.275,00		125.191.204,00		128.594.607,00		133.022.814,00		
Meningkatnya pelayanan pemanfaatan tanah negara	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP (Persentase)	100	100	244.645.000,00	100	119.658.500,00	100	122.092.275,00	100	125.191.204,00	100	128.594.607,00	100	133.022.814,00		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				244.645.000,00		119.658.500,00		122.092.275,00		125.191.204,00		128.594.607,00		133.022.814,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	4	244.645.000,00	3	119.658.500,00	2	122.092.275,00	2	125.191.204,00	2	128.594.607,00	2	133.022.814,00		
2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				579.429.250,00		350.189.500,00		475.634.000,00		480.391.000,00		485.195.000,00		490.047.500,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Persentase)	-	68,44	579.429.250,00	74,72	350.189.500,00	81,01	475.634.000,00	83,80	480.391.000,00	86,59	485.195.000,00	89,11	490.047.500,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Persentase)	-	89,71		92,68		94,66		96,64		98,42		100			
	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Persentase)	-	38,81		50,08		61,35		72,62		83,90		95			
2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				427.314.000,00		261.197.000,00		344.520.000,00		347.965.500,00		351.445.000,00		354.959.500,00		
Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Persentase)	-	76,26	333.025.000,00	83,24	176.592.000,00	90,22	166.790.000,00	93,72	168.458.000,00	96,51	170.142.500,00	99,3	171.844.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				333.025.000,00		176.592.000,00		166.790.000,00		168.458.000,00		170.142.500,00		171.844.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)	4	2	333.025.000,00	2	176.592.000,00	2	166.790.000,00	2	168.458.000,00	2	170.142.500,00	2	171.844.000,00		
Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Persentase)	-	39,61	94.289.000,00	51,69	84.605.000,00	63,77	177.730.000,00	75,85	179.507.500,00	87,92	181.302.500,00	100	183.115.500,00		
2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				94.289.000,00		84.605.000,00		177.730.000,00		179.507.500,00		181.302.500,00		183.115.500,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Dokumen)	2	2	94.289.000,00	2	84.605.000,00	2	177.730.000,00	2	179.507.500,00	2	181.302.500,00	2	183.115.500,00		
2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				133.596.250,00		88.992.500,00		131.114.000,00		132.425.500,00		133.750.000,00		135.088.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbikan sesuai SOP (Persentase)	-	100	78.180.000,00	100	73.740.500,00	100	115.804.000,00	100	116.962.000,00	100	118.132.000,00	100	119.313.500,00		
2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				78.180.000,00		73.740.500,00		115.804.000,00		116.962.000,00		118.132.000,00		119.313.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)	1	1	78.180.000,00	1	73.740.500,00	1	115.804.000,00	1	116.962.000,00	1	118.132.000,00	1	119.313.500,00		
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi (Persentase)	100	100	55.416.250,00	100	15.252.000,00	100	15.310.000,00	100	15.463.500,00	100	15.618.000,00	100	15.774.500,00		
2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				55.416.250,00		15.252.000,00		15.310.000,00		15.463.500,00		15.618.000,00		15.774.500,00		
Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (Berita Acara)	2	4	55.416.250,00	2	15.252.000,00	2	15.310.000,00	2	15.463.500,00	2	15.618.000,00	2	15.774.500,00		
2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan				18.519.000,00		-		-		-		-		-		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) (Persentase)	-	100	18.519.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				18.519.000,00		-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) (Unit)	-	3	18.519.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 ditetapkan 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan program prioritas yang mengacu pada 2 (dua) program strategis yaitu:

1. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
   b. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan

Program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 meliputi:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / SubKegiatan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY				
	Mengembangkan tata ruang keistimewaan	1.03.12 – Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	
				1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
				1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / SubKegiatan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	
				1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
	Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan	2.10.11 – Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
				2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
				2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	
				2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
				2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
				2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga				
	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.10.05 – Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / SubKegiatan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Perangkat Daerah meliputi kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Sedangkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Perangkat Daerah tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.4. dan tabel 4.5.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	%	N/A	73,11	76,42	79,55	82,21	85,15	88,7	
2	Persentase Kualitas Penataan Ruang	%	N/A	76,03	79,35	82,67	85,99	89,31	92,63	
3	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	%	N/A	70,2	73,49	76,43	78,43	80,99	83,5	
4	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	31,376	30	30,10	30,20	30,30	30,40	30,50	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 selama lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renstra ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
3. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025-2029.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja

Lampiran 2. Cascading Kinerja

POHON KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
***(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)* KOTA YOGYAKARTA**

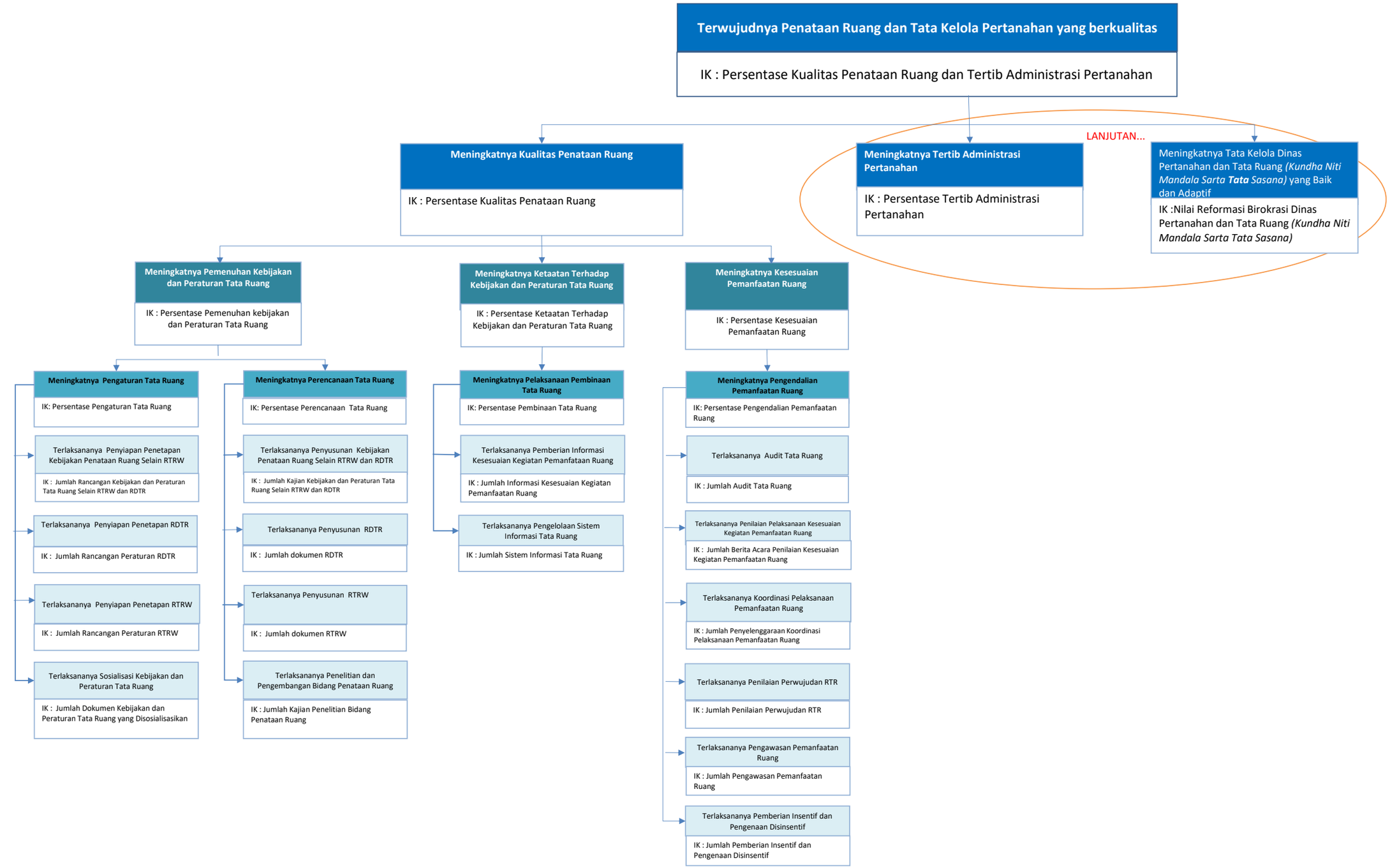

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
DLH, DPUPKP, DPMPTSP, Dinhub, Dinbud, DPP, BPBD, Satpol PP, Kominfo, Bagian Hukum	Penyediaan Data Teknis Sektoral
Kominfo	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang dan Geospasial
DPMPTSP	Pelayanan Non Perijinan dan Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pelayanan Perijinan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Satpol PP	Pelaksanaan Penegakan Perda terkait Penataan Ruang

LANJUTAN 1

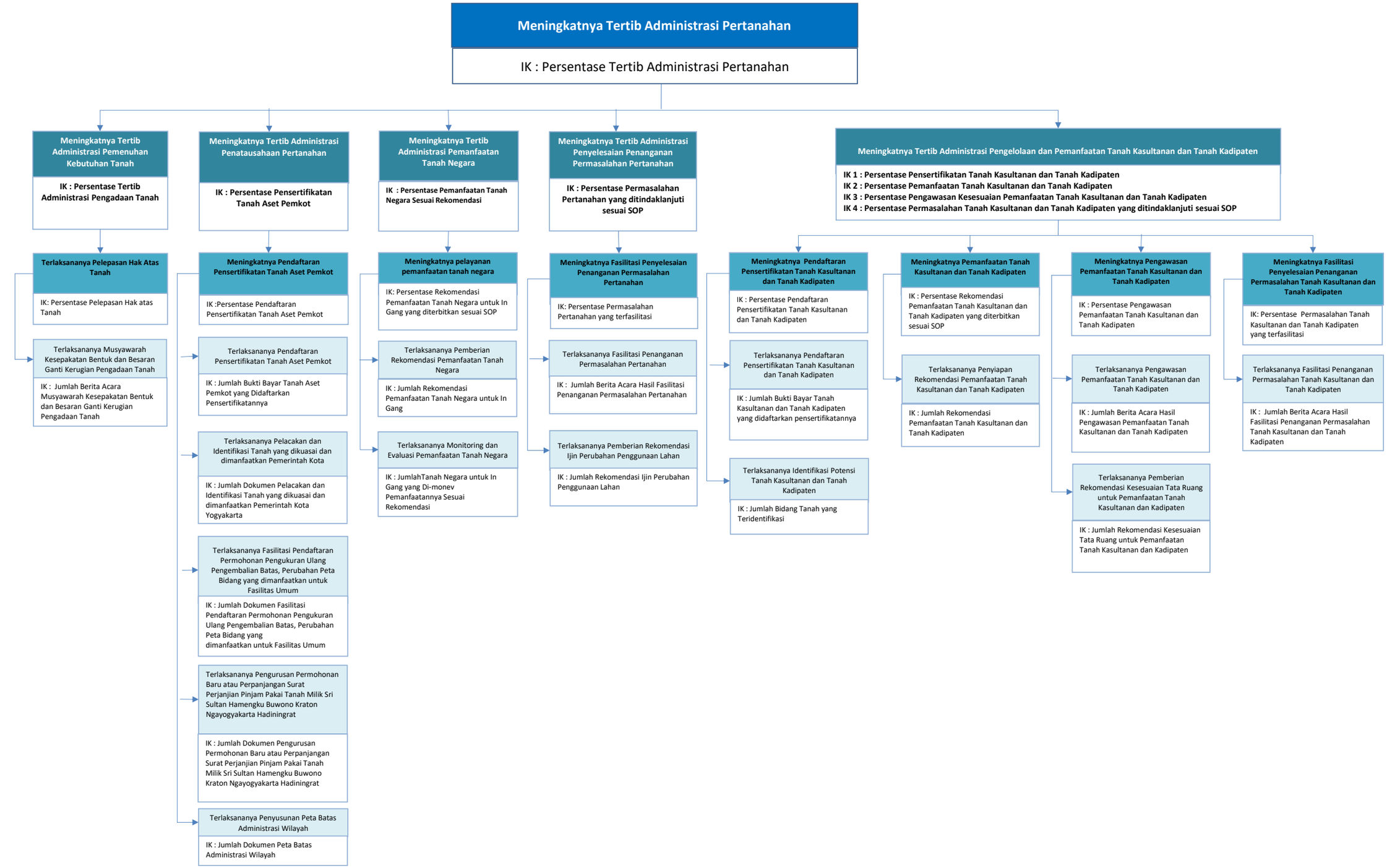
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
IK : Persentase Tertib Administrasi Pertanahan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah
IK : Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pelepasan Hak Atas Tanah
IK: Persentase Pelepasan Hak atas Tanah
Terlaksananya Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
IK : Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan
IK : Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot
Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot
IK :Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot
Terlaksananya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot
IK : Jumlah Bukti Bayar Tanah Aset Pemkot yang Didaftarkan Pensertifikatannya
Terlaksananya Pelacakan dan Identifikasi Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Kota
IK : Jumlah Dokumen Pelacakan dan Identifikasi Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Yogyakarta
Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas, Perubahan Peta Bidang yang dimanfaatkan untuk Fasilitas Umum
IK : Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas, Perubahan Peta Bidang yang dimanfaatkan untuk Fasilitas Umum
Terlaksananya Pengurusan Permohonan Baru atau Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
IK : Jumlah Dokumen Pengurusan Permohonan Baru atau Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Terlaksananya Penyusunan Peta Batas Administrasi Wilayah
IK : Jumlah Dokumen Peta Batas Administrasi Wilayah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara
IK : Persentase Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi
Meningkatnya pelayanan pemanfaatan tanah negara
IK: Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP
Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara
IK : Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Negara
IK : JumlahTanah Negara untuk In Gang yang Di-monev Pemanfaatannya Sesuai Rekomendasi
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan
IK : Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan
IK: Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi
Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan
IK : Jumlah Berita Acara Hasil Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan
Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Lahan
IK : Jumlah Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Lahan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK 1 : Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK 2 : Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK 3 : Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK 4 : Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP
Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Terlaksananya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya
Terlaksananya Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Jumlah Bidang Tanah yang Teridentifikasi
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterbitkan sesuai SOP
Terlaksananya Penyiapan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Jumlah Berita Acara Hasil Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
IK : Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK: Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi
Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
IK : Jumlah Berita Acara Hasil Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
Kemantren/ Kelurahan, DLH, DPUPKP, dan OPD Lainnya	Permohonan Pengadaan Tanah

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
BPKAD	Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah
Kemantren/ Kelurahan	Pelaksanaan Konsolidasi di Wilayah
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Pelayanan Pensertifikatan Tanah di Kota Yogyakarta
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Terlaksananya Layanan Identifikasi Tanah Kasultanan

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
DPMPTSP	Pelayanan Persetujuan bangunan gedung
DPUPKP, DLH	Penyediaan data teknis sektoral

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
Kemantren/ Kelurahan	Pelaksanaan Konsolidasi di Wilayah
Dinas Pertanian dan Pangan	Penyediaan Data Sawah Beririgasi

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
Kemantren/ Kelurahan	Pelaksanaan Konsolidasi di Wilayah
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Pelayanan Pensertifikatan Tanah di Kota Yogyakarta
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman	Pelayanan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten dan Data Tanah Kekancingan

LANJUTAN 2

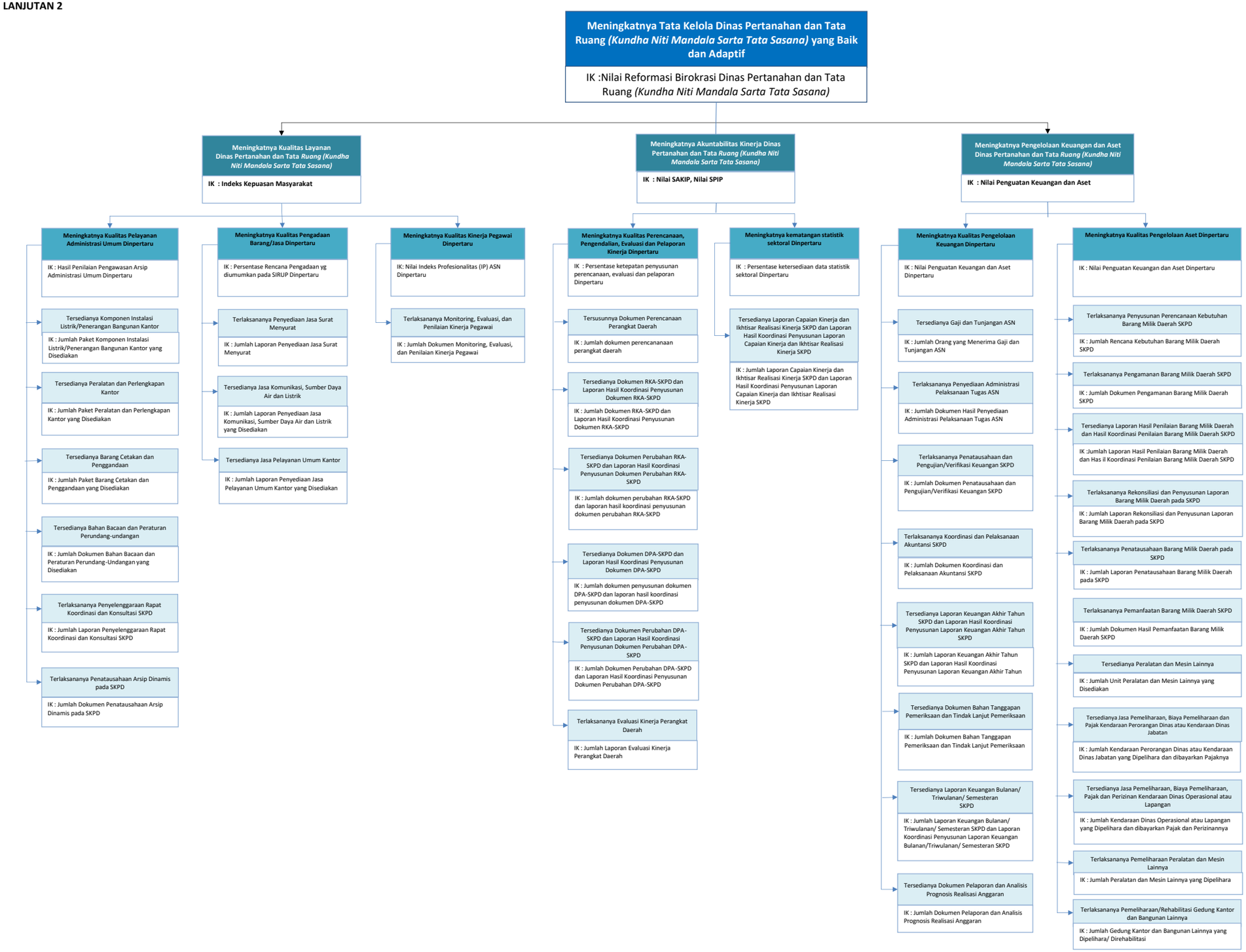
Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang Baik dan Adaptif
IK :Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
IK : Nilai SAKIP, Nilai SPIP
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
IK : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Dinpertaru
IK : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinpertaru
IK : Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinpertaru
IK: Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
IK : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinpertaru
IK : Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen perencananaan perangkat daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya kematangan statistik sektoral Dinpertaru
IK : Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinpertaru
IK : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Dinpertaru
IK : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
IK :Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Has il Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Cross Cutting	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

CASCADING DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*) TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
1	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**	**Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang**	Persentase Kualitas Penataan Ruang	25% Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang + 25% Persentase Ketaatan terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang + 50% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang**	Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	(Jumlah Pelimpahan Rancangan Peraturan Tata Ruang dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Tata Ruang yang akan dilimpahkan) x 100%	BIDANG TATA RUANG	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Pengaturan Tata Ruang**	Persentase Pengaturan Tata Ruang	(Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun dibagi Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan) x 100%	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyiapan Penetapan Kebijakan Penataan Ruang Selain RTRW dan RDTR	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang selain RTRW dan RDTR	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENETAPAN RDTR KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyiapan Penetapan RDTR	Jumlah Rancangan Peraturan RDTR	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyiapan Penetapan RTRW	Jumlah Rancangan Peraturan RTRW	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN BIDANG PENATAAN RUANG	**Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang**	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disosialisasikan	SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG
										KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang**	Persentase Perencanaan Tata Ruang	(Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun dibagi Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan) x 100%	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang Selain RTRW dan RDTR	Jumlah dokumen Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Selain RTRW dan RDTR	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan RDTR	Jumlah dokumen RDTR	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PENGATURAN TATA RUANG	PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan RTRW	Jumlah dokumen RTRW	SEKSI PENGATURAN TATA RUANG
														SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG	PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang**	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Penataan Ruang	SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG
						Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	(Jumlah Pemanfaatan Layanan Informasi Tata Ruang dibagi Jumlah Kebutuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) x 100%	BIDANG TATA RUANG	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang**	Persentase Pembinaan Tata Ruang	((Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Disusun dibagi Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Direncanakan) + (Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola dibagi Jumlah Rencana Sistem Informasi yang Akan Dikelola)) dibagi 2	SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG	PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	**Terlaksananya Pemberian Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang**	Jumlah Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG
														SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG	SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Tata Ruang**	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang	SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG
						Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	(Luas Area Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang dibagi Luas Wilayah Kota Yogyakarta) x 100%	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	(Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Disusun dibagi Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan) x 100%	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	PELAKSANAAN AUDIT TATA RUANG	**Terlaksananya Audit Tata Ruang**	Jumlah Audit Tata Ruang	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
															PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK	**Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	Jumlah Berita Acara Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
															OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG	**Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
															PENGAWASAN TURBINLAK DAN PENGAWASAN FUNGSI DAN MANFAAT	**Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang**	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
															PENILAIAN PERWUJUDAN RTR	**Terlaksananya Penilaian Perwujudan RTR**	Jumlah Penilaian Perwujudan RTR	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
															PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF NON FISKAL	**Terlaksananya Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif**	Jumlah Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	15% Persentase Tertib Administrasi PengadaanTanah + 15% Persentase Penserfifikatan Tanah Aset Pemkot + 15% Persentase Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi + 15% Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP + 10% Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten + 10% Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten + 10% Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten + 10% Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	(Jumlah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dibagi Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot) x 100%	BIDANG PERTANAHAN	PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Terlaksananya Pelepasan Hak Atas Tanah**	Persentase Pelepasan Hak atas Tanah	(Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian PengadaanTanah dibagi Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot pada Tahun n) x 100%	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah**	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan**	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	(Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Bersertifikat dibagi Data Aset Tanah Pemkot) x 100%	BIDANG PERTANAHAN	INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	**Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	(Jumlah Bukti Bayar Tanah Aset Pemkot yang Didaftarkan Pensertifikatannya dibagi Data Aset Tanah Pemkot) x 100%	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN	PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG	**Terlaksananya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	Jumlah Bukti Bayar Tanah Aset Pemkot yang Didaftarkan Pensertifikatannya	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Pelacakan dan Identifikasi Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Pelacakan dan Identifikasi Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Yogyakarta	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas, Perubahan Peta Bidang yang dimanfaatkan untuk Fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas, Perubahan Peta Bidang yang dimanfaatkan untuk Fasilitas Umum	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Pengurusan Permohonan Baru atau Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Jumlah Dokumen Pengurusan Permohonan Baru atau Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Penyusunan Peta Batas Administrasi Wilayah	Jumlah Dokumen Peta Batas Administrasi Wilayah	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara**	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai rekomendasi	(Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang Sesuai Rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan) x 100%	BIDANG PERTANAHAN	PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Tanah Negara**	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang yang diterbitkan sesuai SOP	(Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk ing Gang yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Masuk pada Tahun-n) x 100%	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	**Terlaksananya Pemberian Rekomendasi pemanfaatan tanah negara**	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Negara	JumlahTanah Negara untuk In Gang yang Di-monev Pemanfaatannya Sesuai Rekomendasi	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan**	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	(Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk) x 100%	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan**	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi	(Jumlah Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk) x 100%	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	INVENTARISASI KASUS PERTANAHAN DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan**	Jumlah Berita Acara Hasil Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Lahan	Jumlah Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Lahan	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Bersertifikat dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) x 100%	BIDANG PERTANAHAN	PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	**Meningkatnya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) x 100%	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN	PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	**Terlaksananya Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Bidang Tanah yang Teridentifikasi	SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN
							Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk) x 100%	BIDANG PERTANAHAN	PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	**Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbikan sesuai SOP	(Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk pada Tahun-n) x 100%	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN	PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	**Terlaksananya Penyiapan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	SEKSI PEMANFAATAN PERTANAHAN
							Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai pemanfaatannya dibagi Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev) x 100%	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	**Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Telah Dimonev dibagi Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev) x 100%	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	PENGAWASAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA	**Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Jumlah Berita Acara Hasil Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
																Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
							Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	(Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk) x 100%	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	**Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi	(Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk) x 100%	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA	**Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Jumlah Berita Acara Hasil Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	SEKSI PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
										SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)**	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Terlaksanananya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**	Nilai SAKIP Dinpertaru	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	SEKRETARIAT	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)***	Persentase Ketepatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinpertaru	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang wajib disusun) x 100%	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencananaan Perangkat Daerah	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
							Nilai SPIP Dinpertaru	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat				Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dinpertaru	(Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral) x 100%	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	**Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
							Nilai IKM Dinpertaru	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat						SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	**Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
														SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	**Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
														SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	**Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
														SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
														SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
										ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)***	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinpertaru oleh BPKAD	SUB BAG KEUANGAN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	**Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	**Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	**Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SUB BAG KEUANGAN
														SUB BAG KEUANGAN	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	**Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SUB BAG KEUANGAN

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
										ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinpertaru oleh BPKAD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	**Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	**Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	**Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Has il Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	**Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	**Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinpertaru oleh BPKAD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinpertaru oleh BPKAD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru	Hasil nilai IP ASN Dinpertaru	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru	(Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinpertaru dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinpertaru) x 100%	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinpertaru	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	**Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	**Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	**Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	**Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME sehingga penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dapat terselesaikan. Rencana strategis ini sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Yogyakarta dan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Strategis ini memuat beberapa strategi serta indikasi program kegiatan dan anggaran yang akan menjadi landasan serta pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Penyusunan Renstra mendasarkan pada masukan-masukan dari berbagai pihak dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta maupun internal unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Renstra ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renstra ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renstra di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197410101993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-3

1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... II-1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-2

2.2.1. Sumber Daya Pegawai..... II-2

2.2.2. Sarana dan Prasarana..... II-4

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-6

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah II-10

2.5. Mitra Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah II-11

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-12

2.6.1. Permasalahan Perangkat Daerah II-12

2.6.2. Isu Strategis II-14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran..... III-1

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... III-4

3.2.1 Strategi..... III-4

3.2.2. Arah Kebijakan..... III-8

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan..... IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan..... IV-30

BAB V PENUTUP V-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2025 Satpol PP Kota Yogyakarta	II-4
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024	II-9
Tabel 2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah....	II-18
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta.....	III-8
Tabel 4.1	Teknik merumuskan program / kegiatan / sub kegiatan Rancangan akhir renstra pd pemerintah kota yogyakarta.....	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-14
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra.....	IV-30
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra PD....	IV-31
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta	II-2
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan.....	II-3
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan.....	II-3
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin	II-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan *(stakeholders)*, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Sebagai dokumen strategis, Renstra Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan strategis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2045; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakata sampai dengan tahun 2045; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

(4) RPD atau Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dengan memberikan gambaran

ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025- 2029
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematikan Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dan menyajikan kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP
2. Sekretariat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
    a. Seksi Penyidikan
    b. Seksi Pengendalian Operasional
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
    a. Seksi Pengamanan
    b. Seksi Deteksi dan Cegah Dini

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM
    a. Seksi Pembinaan SDM
    b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
    a. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas
    b. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta

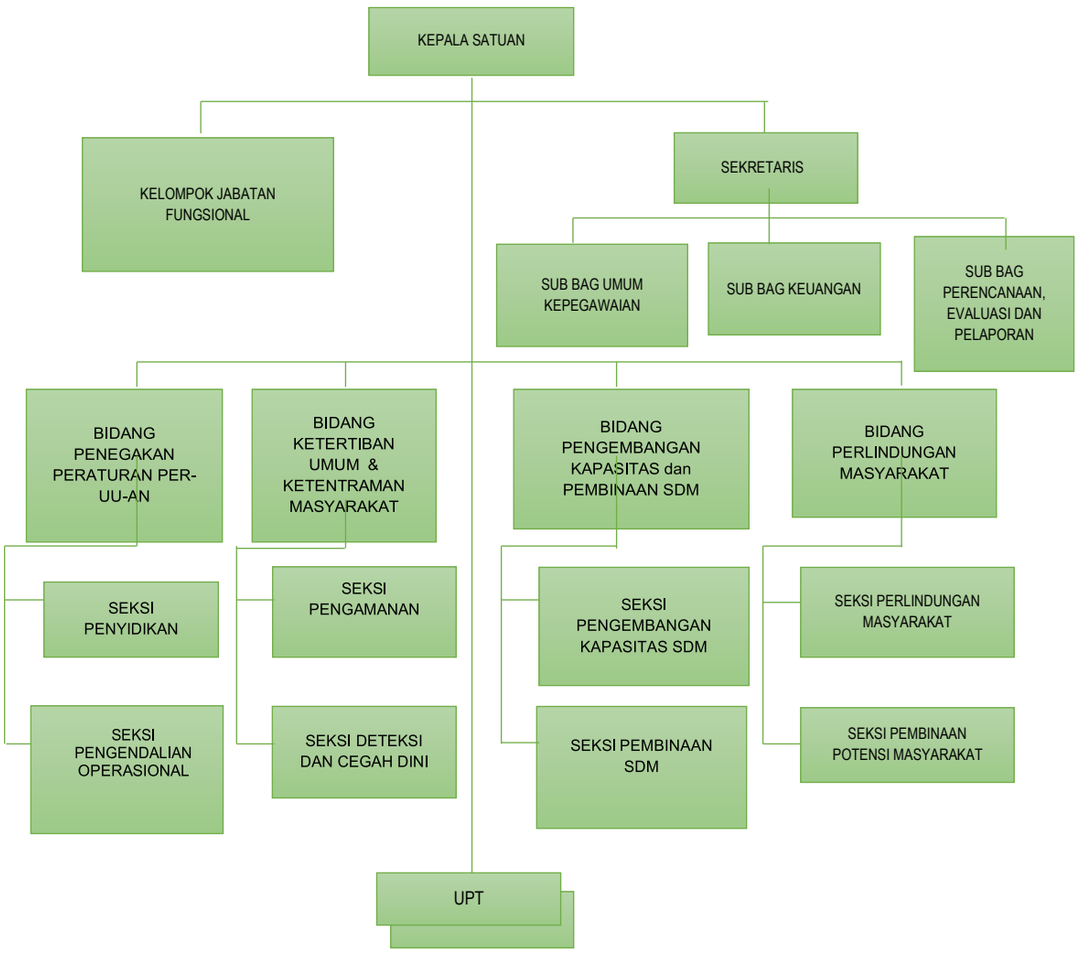

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2024 di luar tenaga alih daya (outsourcing) sejumlah 235 pegawai yang terdiri dari 145 Pegawai Negeri Sipil, 2 Pegawai PPPK, dan 88 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP) dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
    c. Golongan I : 1 orang
    d. Golongan II : 91 orang
    e. Golongan III : 46 orang
    f. Golongan IV : 7 orang
    g. PPPK : 2 orang

Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

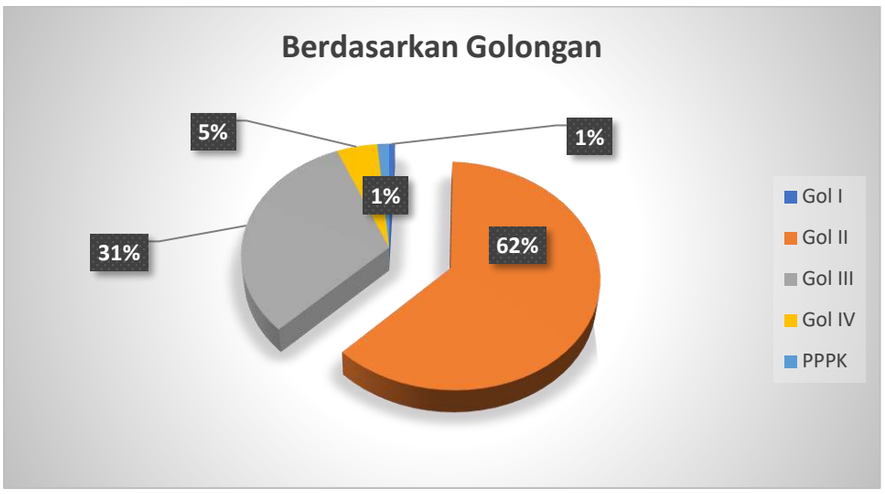

2. Menurut Pendidikan
   a. S2 : 7 orang
   b. S1 : 34 orang
   c. Diploma : 24 orang
   d. SLTA : 74 orang
   e. SLTP : 7 orang
   f. SD : 1 orang

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan

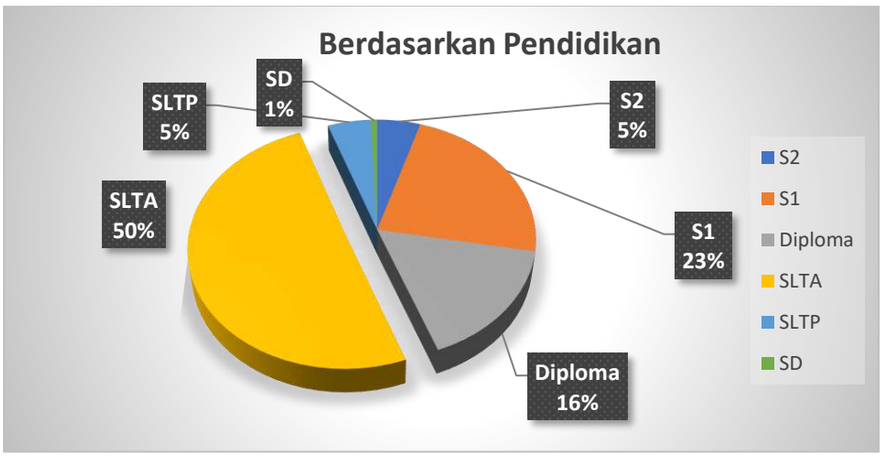

3. Menurut Jenis Kelamin
   a. Laki-laki : 123 orang
   b. Perempuan : 24 orang

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin

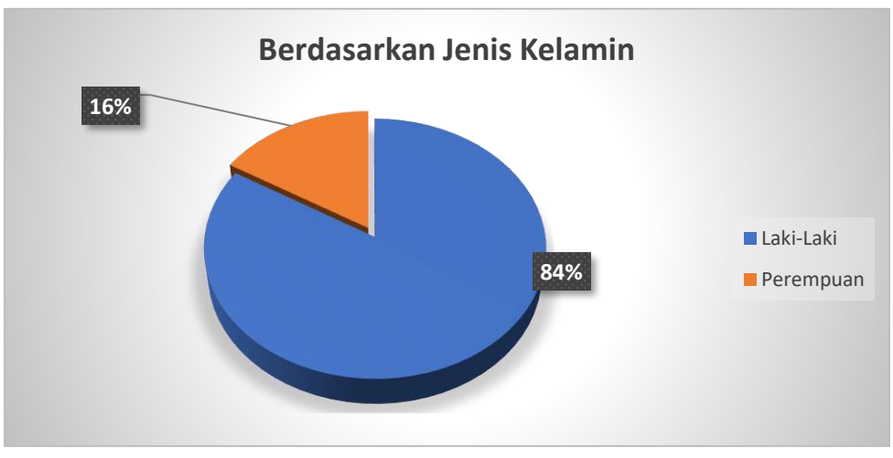

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta terletak di Komplek Balaikota Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta dengan luas bangunan 1205 m2 dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yustisi dan non yustisi seluas 1301 m2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP didukung dengan persediaan sarana dan prasarana (ATK, perlengkapan dan peralatan kerja, serta prasarana pada umumnya termasuk alat kerja pendukung kendaraan operasional. Berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP, Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sarana dan prasarana minimal yang harus terpenuhi oleh Satpol PP meliputi :

Gedung kantor, terdiri atas :

1) ruang kerja pimpinan dan staf;
2) ruang pos jaga;
3) ruang rapat;
4) ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
5) ruang penyimpanan barang/gudang;
6) ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
7) ruang sidang majelis kode etik;
8) tempat apel/upacara; dan
9) halaman parkir.

Kendaraan operasional, terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Perlengkapan operasional, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.

Tabel 2.1
Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2025
Satpol PP Kota Yogyakarta

No	Sarpras Minimal sesuai Permendagri No 17 Tahun 2019	Sarpras Satpol PP Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
1.	**Gedung kantor**	
a.	ruang kerja pimpinan dan staf;	Terdapat ruang kerja pimpinan dan staf meskipun belum memenuhi standar luasan dengan jumlah staf
b.	ruang pos jaga;	Terdapat pos jaga meliputi pos jaga di kantor, baik Kantor Satpol PP maupun Kantor Pemerintah Kota di akses pintu masuk dan keluar;

		terdapat juga posko portabel sebagai pos jaga bergerak di wilayah
c.	ruang rapat;	Terdapat 2 ruang rapat
d.	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	Terdapat ruang pengaduan dan penyidikan pelanggaran perda
e.	ruang penyimpanan barang/gudang;	Terdapat gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran perda
f.	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	Terdapat ruang seksi penyidikan (PPNS) menjadi satu ruangan sekretariat PPNS
g.	ruang sidang majelis kode etik;	Menjadi satu dengan ruang rapat
h.	tempat apel/upacara; dan	Terdapat tempat apel
i.	halaman parkir.	Terdapat halaman parkir meskipun dari segi kapasitas masih belum ideal dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada
2.	**Kendaraan operasional**, terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.	) Truk Besar : 2 unit (Truk Dalmas dan truk besar)) Truk Sedang : 1 unit) Mobil Jenis Offroad/Jeep : 2 Unit)) Sepeda motor : 45 unit (8 motor untuk keperluan pengamanan dan pengawalan yang dilengkapi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP; 37 untuk patroli penegakan perda)
3.	Perlengkapan operasional, antara lain :	
	a. Perorangan, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.	Pakaian Dinas terdiri atas Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan I dan II, Pakaian Dinas Khusus Satgas I dan II, PDU, Perlengkapan Pakaian Anti Huru-Hara telah dicukupi secara bertahap; sarpras yang lain seperti jaket, rompi, senter, ransel, tameng, borgol, masker, masker respirator telah tercukupi; tonfa dan holster tonfa, ferplas, sleeping bag belum tersedia

		karena menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan
	b. Beregu/ Patroli, terdiri atas HT, Tali carmantel, Sarung Tangan Tahan Panas, gergaji mesin, pistol, helm, megaphone, body harness, kacamata pelindung	HT (40 unit); Tali carmantel (4 buah untuk kebencanaan), Sarung Tangan Tahan Panas (5 buah untuk kebencanaan), gergaji mesin (5 buah untuk kebencanaan), pistol, helm tidak ada, megaphone (6 buah untuk kegiatan patroli), body harness (5 buah untuk kebencanaan), kacamata pelindung (10 buah untuk kebencanaan dan penegakan perda
	c. Penegakan Perda dan Perkada, terdiri atas galah stainless steel, tang, alat pemotong rantai, dongkrak buaya, gerinda listrik, rantai besi segel, gembok, thermogun	galah stainless steel (42 buah), tang, alat pemotong rantai (2 buah), dongkrak buaya (2 buah), gerinda listrik (1 unit), rantai besi segel (20 buah), gembok (20 buah), thermogun (5 buah)

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pada periode renstra sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan strategis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Proses penyusunan renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi Kota Yogyakarta sebagaimana yang tertuang di dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-7 pembangunan Kota Yogyakarta yakni "Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai" dengan Sasaran Pemerintah Daerah "Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat". Penentuan indikator capaian sasarannya yakni Jumlah Pelanggaran Perda. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama periode renstra 2023-2026 adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Meningkatkan reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan rumusan cascading Renstra 2023-2026 Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat diperoleh dari Laporan Hasil

Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan indikator Persentase (%) Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat diperoleh dari akumulasi komposit realisasi kinerja dari indikator kinerja program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain indikator Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2023-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Yogyakarta diantaranya melalui:

a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
c. Penegakan peraturan perundangan
d. Peningkatan kapasitas dan Pembinaan SDM Satpol PP

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD mengalami perubahan menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Meskipun terdapat perubahan jumlah dan nomenklatur program, sasaran dan indikator program dalam RPJMD sebelumnya masih relevan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada Satpol PP sehingga secara substansi perubahan nomenklatur tersebut tidak begitu mempengaruhi perubahan struktur perencanaan kinerja.

Pencapaian target sasaran Program Satpol PP berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja Satpol PP selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Secara lengkap, pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	84,92%	94,73%	97,72%	97,22%	97,88%
Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
Sasaran:						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	84,92%	94,73%	97,72%	97,22%	97,88%
Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 97,88% dari target sebesar 97,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,22% persen; dan Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah sesuai target dimana realisasinya sebesar 100% terhadap target.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 97,88%

dari target sebesar 97,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,22% persen; dan Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah sesuai target dimana realisasinya sebesar 100% terhadap target

Memperhatikan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan persentase 100,37%, pada tahun 2024 capaian realisasi sasaran dan realisasi program mengalami penurunan persentase capaian kinerja sebesar 0,15%. Secara realisasi program, seluruh indikator sasaran program pendukung komposit sasaran OPD telah memenuhi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut evaluasi capaian kinerja program pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik melalui strategi-strategi peningkatan kinerja pada Bidang Pengampu program kegiatan.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk urusan keistimewaan dengan kelompok sasaran layanan diantaranya masyarakat, dunia usaha, institusi, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ruang linkup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ini mencakup :

1. Mutu Pelayanan Dasar
2. Kriteria Penerima; dan
3. Tatacara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar yaitu seluruh Warga Negara, khususnya yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan

Perkada adalah 1) Pelayanan kerugian materi dan 2) pelayanan pengobatan, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cidera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud. Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan adalah pelaksanaan penegakan perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, dan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah

Di dalam pencapaian tujuan kinerja pelayanan publik, Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dan didukung unsur 5 K (Kota, Kampung, Komunitas, Kampus, dan Korporate).

1. Kota

   Kolaborasi dalam mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat melalui koordinasi dan sinergi kegiatan dengan OPD lain dan institusi penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Dirjen Bea Cukai).

   Adapun *cross cutting* ketugasan dengan OPD lain diantaranya :

   a. Bakesbangpol selaku mitra kegiatan Deteksi dan Cegah Dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
   b. Dindikpora selaku OPD Pembina dan Pengawas pelajar sekolah
   c. Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan dalam kaitannya dengan pengamanan event kegiatan dan kejadian unjuk rasa serta patroli terpadu pencegahan gangguan trantibum
   d. OPD Teknis Pembina dan Pengawas Perda dan Perkada serta Kemantren dalam hal koordinasi dukungan terhadap pembinaan dan pencegahan pelanggaran perda non yustisi serta penegakan perda dan perkada yang bersanksi pidana, Dukungan koordinasi, mitra, sekaligus selaku objek maupun subjek yang turut aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas melalui kegiatan kampung panca tertib dan pantib for school
   e. OPD Teknis pengampu Kepegawaian (BKPSDM) dan Pelatihan SDM dan OPD lainnya serta Lembaga/institusi lain yang kompeten melaksanakan *transfer knowledge* dan *skill* pendukung ketugasan Satpol PP dan Satlinmas selaku mitra pendukung kegiatan pengembangan kapasitas SDM petugas Pol PP dan Linmas
   f. Kemantren dan Kelurahan Selaku Koordinator Satgas dan Satlinmas Wilayah
   g. OPD *leading sector* dalam mendukung ketugasan Program Internal Satpol PP

2. Kampung

   Keterlibatan masyarakat dalam Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib) dengan melaksanakan deklarasi dan penumbuhan Kampung Panca Tertib

3. Komunitas

   Peran serta organisasi kemasyarakatan melalui kerjasama daerah dalam turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta

4. Kampus

   Keterlibatan unsur akademisi dalam pelaksanaan strategi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota secara preventif melalui konsultansi permasalahan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga akademisi juga telah dilakukan untuk menunjang optimalisasi kinerja instansi. Selain itu juga melaksanakan deklarasi Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) dalam upaya memberikan pemahaman pelajar di Kota Yogyakarta untuk berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

5. Korporate

   Keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah terutama peraturan daerah yang mengatur perizinan berusaha di Kota Yogyakarta

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Yogyakarta erat bersinggungan dengan permasalahan dan isu gender yang menyasar 5 kelompok rentan, yakni fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia. Berdasarkan Alat Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) Satpol Tahun 2024, terdapat faktor kesenjangan dan permasalahan yang menjadi perhatian untuk dilakukan intervensi dan inisiasi dalam pemecahan masalahnya, yakni terkait dengan masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang peraturan daerah dan keterbatasan akses sinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan dan atau mengantisipasi potensi gangguan trantibum di wilayah. Memperhatikan aspek partisipasi, selama ini masih banyak masyarakat baik laki-laki, wanita dan anak-anak yang hanya menjadi “penonton” dan belum pernah secara khusus mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Yogyakarta sehingga membatasi untuk partisipasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Padahal masyarakat baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak berhak mendapatkan pengetahuan tentang peraturan daerah. Penyebabnya salah satunya adalah belum adanya forum bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan/pendapat/usulan terkait permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah Kota Yogyakarta. Begitu juga dengan anak-anak, khususnya para pelajar di Kota Yogyakarta memerlukan media dan sarana bagi mereka untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan pembentukan sikap, perilaku, dan karakter sejak usia dini dalam kaitannya dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan.

Menindaklanjuti permasalahan dan isu gender tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta telah mengupayakan kegiatan diantaranya dengan perubahan strategi peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan perda secara preemtif melalui kebijakan berbasis kampung yang dituangkan dalam Peraturan daerah dan peraturan Walikota yang mengatur tentang Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib For School. Melalui kegiatan tersebut masyarakat, lebih khususnya laki-laki dan perempuan serta para pelajar diberikan ruang untuk lebih memahami informasi dan peraturan daerah serta berkesempatan untuk berperan aktif dalam penegakan perda dan mewujudkan trantibumlinmas dan mulai dari usia dini dan wilayah masing-masing kampung.

Terkait dengan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta, Satpol PP mengawal penegakan Perda dan Perkada dengan sasaran pelanggaran meliputi

golongan yang memerlukan afirmasi khusus. Sebagai contoh adalah penegakan terhadap Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dalam hal ini melindungi hak untuk hidup sehat dan tidak terganggu asap rokok bagi orang yang tidak merokok, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Kemudian penegakan perda terkait dengan gelandangan dan pengemis, Satpol PP berkoordinasi secara terpadu dengan Dinas Sosial dan dalam penanganannya dilakukan secara humanis, tentunya sesuai dengan SOP kegiatan yang berlaku. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) juga kerap dilaksanakan oleh Satpol PP melindungi hak pejalan kaki, khususnya kaum disabilitas yang seringkali akses jalan digunakan/ ditutup untuk berjualan sehingga fungsi jalan yang dikhususkan untuk kaum difabel menjadi terhambat. Tentunya masih terdapat ketugasan penegakan perda lain yang diampu oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung eksistensi dan pemenuhan hak penerima afirmasi khusus.

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan dan juga faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

1. Angka Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.

   Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai

4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran perda mencapai angka 4035 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar

2. Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai ekses dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Belum optimalnya dukungan dan kesadaran seluruh pihak (OPD terkait, instansi vertikal, pemangku wilayah, serta pengambil kebijakan) melalui forum lintas sektoral dalam rangka sinergitas untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan penegakan perda masih dilakukan secara parsial, belum seluruhnya terintegrasi pada berbagai aspek dari sisi sosialisasi, pencegahan, dan penindakan, baik integrasi di internal Satpol PP maupun eksternal dengan institusi penegak peraturan lainnya. Belum optimalnya sistem manajemen informasi penegakan peraturan daerah sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sepatutnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder terkait sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.
5. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Satpol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Dinamisasi perubahan peraturan dan kebijakan aturan yang tinggi dari pemerintah pusat menjadi kendala dalam penegakan perda

2.6.2 Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan tugas dan fungsi serta memperhatikan identifikasi permasalahan urusan trantibumlinmas, isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta untuk perencanaan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pelanggaran perda dan perkada seiring dengan dinamisasi peraturan dan kebijakan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di tengah tantangan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda secara Humanis, Tegas, Profesional

   Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian dan pembangunan pasca pandemi covid19, jumlah pelanggaran perda mencapai angka 4175 pelanggaran dan di tahun 2024 jumlah pelanggaran perda mengalami penurunan mencapai 4035 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.

   Demikian juga masih terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang sering terjadi, diantaranya pelanggaran terhadap Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak dan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik. Pada tahun 2024 bahkan banyak terjaring pelanggaran terhadap Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan pelanggaran mencapai sejumlah 18.504 pelanggaran.

   Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, ditambah dengan para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas

sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Permasalahan lain yang juga harus diantisipasi oleh Satpol PP dalam ketugasan penegakan perda ini terkait menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Satpol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan dan isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasan khususnya penegakan perda. Oleh karena itu Satpol PP Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat berkinerja secara Humanis, Tegas, dan Profesional.

2. Perlunya optimalisasi sinergitas antar aparatur penegak peraturan perundang-undangan, termasuk kolaborasi lintas sektor dengan OPD teknis pembina dan pengawas peraturan daerah

   Pada dasarnya kerjasama penegakan perda dan penanggulangan gangguan trantibumlinmas yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan OPD Teknis terkait. Tentunya kolaborasi lintas sektor tersebut dapat lebih dioptimalkan dengan penguatan komitmen bersama dari stakeholder dan mitra kerja Satpol PP, termasuk OPD Pembina dan Pengawas Perda, mengingat urusan trantibum bukan semata ketugasan Satpol PP melainkan juga diperlukan dukungan dan sinergi dari stakeholder lainnya dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram untuk tujuan pembangunan pada umumnya. Salah satu potensi gangguan trantibum yang urgen harus ditanggulangi adalah masih maraknya fenomena kejahatan jalanan di masyarakat yang sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Yogyakarta, di samping pengendalian gangguan tibumtranmas terhadap aktivitas dan kegiatan lain di masyarakat yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak kriminal.

3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi secara terpadu dalam rangka mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda.

   Diperlukan Sistem informasi manajemen terpadu dan terintegrasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda serta penganggulangan potensi gangguan trantibum oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder terkait sehingga pelaksanaan ketugasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Konsistensi dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
   - ⇨ SATPOL PP BERKAT (Bergerak Bersama Masyarakat)
   - ⇨ SATPOL PP BERKAH (Bergerak Bersama Sekolah)
   - ⇨ Partisipasi aktif masyarakat dalam keanggotaan LINMAS

   Secara data sampai dengan tahun 2024 peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta

melalui kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) semakin bertambah. Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2023 adalah 146 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2024 telah terdapat 12 Kampung yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2024 adalah 158 kampung.

Begitu pula dengan tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan tugas perbantuan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2024.

Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4259 personil dari jumlah 169 kampung di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan angka 4234 petugas linmas di Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah petugas linmas di tahun 2024, walaupun tidak signifikan dibanding tahun 2023, di samping animo yang tinggi dari masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketenteraman dan keamanan melalui keanggotaan linmas di wilayahnya masing-masing, juga diindikasi karena adanya event kegiatan rangkaian pemilihan presiden wakil presiden dan anggota legislatif serta pemilukada di tahun 2024 yang memerlukan dukungan fungsi dan ketugasan linmas.

Tentunya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam turut menjaga dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum perlu dipelihara dan dirawat mengingat masyarakat merupakan komponen penting dan strategis dalam penciptaan kondisi tersebut. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri dan menjadi isu strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP dan Kota Yogyakarta untuk masa yang akan datang.

Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Angka Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.	Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota; Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global; Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Tantangan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda secara Humanis, Tegas, Profesional Konsistensi dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal	Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota; Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	optimalisasi sinergi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, termasuk kolaborasi lintas sektor dengan OPD teknis pembina dan pengawas peraturan daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum; Konsistensi dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

	Belum optimalnya dukungan dan kesadaran seluruh pihak (OPD terkait, instansi vertikal, pemangku wilayah, serta pengambil kebijakan) untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta		Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	optimalisasi sinergi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, termasuk kolaborasi lintas sektor dengan OPD teknis pembina dan pengawas peraturan daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan penegakan perda masih dilakukan secara parsial, belum seluruhnya terintegrasi pada berbagai aspek dari sisi sosialisasi, pencegahan, danpenindakan, baik integrasi di		Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Pemanfaatan Sistem informasi manajemen terpadu dan terintegrasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda serta penganggulangan potensi gangguan trantibum

	internal Satpol PP maupun eksternal dengan institusi penegak peraturan lainnya					
	Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Satpol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi		Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	optimalisasi sinergi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, termasuk kolaborasi lintas sektor dengan OPD teknis pembina dan pengawas peraturan daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
	Dinamisasi perubahan peraturan dan kebijakan aturan yang tinggi dari pemerintah pusat menjadi kendala dalam penegakan perda		Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan; Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional; Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya; Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY; Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Tantangan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda secara Humanis, Tegas, Profesional

Tantangan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan Satpol PP

a. strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Diperlukan strategi penegakan perda dan perkada yang terintegrasi antar institusi atau aparat penegak hukum lainnya
b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, Satpol PP harus dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan penegakan perda dan perkada di Kota Yogyakarta
c. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya keterbatasan anggaran belanja operasional
d. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
e. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
f. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
g. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
h. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
i. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
j. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
k. Adanya dukungan moral dan peran serta aktif dari masyarakat Kota Yogyakarta.
l. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja antar instansi/ lembaga terkait semakin mantap.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut

VISI	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
MISI 1	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
MISI 3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
MISI 4	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
MISI 5	Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Berkaitan dengan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan telaah terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta. Dari hasil telaah tersebut Satpol PP Kota Yogyakarta mendukung dan melaksanakan Misi ke-4 Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945. Satpol PP Kota Yogyakarta menetapkan tujuan berdasarkan misi yang didukung yakni Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama periode renstra 2025-2029 adalah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU). IPKKU adalah Satuan Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menliai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu, diantaranya meliputi dimensi Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja yakni Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan komposit yang didapatkan dari realisasi kinerja diantaranya (1) Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (2) Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. (3) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam turut mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Tugas Perbantuan Linmas dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan potensi masyarakat (4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Satlinmas mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan ketugasan.

Selain itu juga ditentukan Sasaran Strategis lainnya yakni Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja. Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Satpol PP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Evaluasi RB oleh Inspektorat tersebut juga mengacu

pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi, diantaranya :

Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Instrumen Penilaian	Bobot	Rentang Penilaian	*Leading Sector*
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	Inspektorat
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0 – 100	Inspektorat
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	BPKAD
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	Bagian Organisasi
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	0 – 100	Bagian PBJ
6.	Indeks Profesionalitas ASN	5	0 – 100	BKPSDM
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0 – 5	Diskominfosan

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman, dan terib	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A	70	75	80	85	90	91	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	90.61	92.17	93.67	95.02	96.36	97.70	99.08	
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

3.2.1. Strategi

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung Sasaran Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui upaya dan strategi secara Preemtif, Preventif, Represif Yustisi dan Non Yustisi Penegakan Perda perkada, dengan didukung Penguatan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan dan Pengawasan Internal serta Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan linmas, dengan rincian sebagai berikut:

1) Strategi dan Upaya Preemtif

   Optimalisasi Keterlibatan peran dan Partisipasi aktif masyarakat dalam turut serta mewujudkan kondisi Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui upaya diantaranya :

   a. Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas melalui Gerakan Panca Tertib

      Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 158 kampung dari 169 kampung yang telah mencanangkan Kampung Panca Tertib dan 20 Sekolah yang telah deklarasi komitmen Pantib for School. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

      - Sosialisasi perda dan perkada di kampung dan sekolah,
      - Pencanangan dan Perawatan Kampung Panca Tertib melalui rembug kampung panca tertib;
      - Pencanangan dan Perawatan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah) ➔ Pembentukan Praja Kota Yunior (JATAYU)

- Pemetaan daerah rawan pelanggaran perda dan perkada berbasis kampung

b. Partisipasi aktif masyarakat dalam tugas perbantuan linmas, melalui kegiatan:
   - pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas
   - dukungan petugas linmas dalam membantu mewujudkan tibumtranmas
   - tugas perbantuan petugas linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

   Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 4259 petugas linmas yang terdaftar di dalam SIM Linmas

c. Sosialisasi penegakan perda dan perwal secara masif melalui media sosial Satpol PP (Instagram, X Twitter, Facebook, Tik-Tok dan Website) dengan pembuatan konten edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan penegakan dan edukasi ketentuan peraturan daerah dan peraturan walikota.

d. Penguatan Kerjasama dan Dukungan Ketugasan melalui Forum Lintas Sektor/ Lintas OPD

2) Strategi Dan Upaya Preventif

Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelanggaran Perda Perkada melalui :

a. Pelaksanaan patroli petugas Pol PP dan petugas Linmas dalam rangka pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Walikota serta pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
   - Pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh personil Satpol PP yang tergabung dalam beberapa regu 3 shift selama 24 jam
   - Kegiatan patroli secara rutin oleh Satlinmas Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta (3 shift setiap hari) dalam rangka turut membantu mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanganan musibah dan bencana
   - Patroli Bina Pelajar, melakukan pembinaan terhadap pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Tim Gabungan yang terdiri dari : Polresta Yogyakarta, Sat. Pol. PP DIY, Dinas Pendidikan, dan Sat. Pol. PP Kota Yogyakarta. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bina Pelajar ini adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

b. Deteksi dan Cegah Dini Patroli Pengamanan tertutup petugas Pol PP dalam upaya mencegah gangguan tibumtranmas dan penanggulangan potensi konflik serta pelanggaran perda perkada.

c. Pelaksanaan pengamanan umum kegiatan dan event-event di Kota Yogyakarta, termasuk diantaranya pengamanan lebaran, rangkaian sekaten, rangkaian pemilu, Nataru, WJNC, HUT Kota, HUT Pemkot Yk dan event pemkot yang lain baik yang telah teragendakan maupun insidentil, pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP), penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara)

objek vital/tempat penting Pemkot Yogyakarta, serta pelaksanaan patroli khusus antisipasi aksi kejahatan jalanan

d. Partisipasi dalam kegiatan Jagawarga sebagai dukungan kegiatan dari Satpol PP Provinsi DIY (DAIS) ➔ Fasilitasi kegiatan kelompok jagawarga yang telah terbentuk sejumlah 170 kelompok; Pada tahun perencanaan 2026, kegiatan menyesuaikan ketersediaan usulan dan anggaran bersumber dari dana transfer (DAIS) karena sampai dengan penyusunan rancangan renja ini belum terdapat kepastian kebijakan dari Pemerintah Pusat apakah Satpol PP mendapatkan pagu anggaran kegiatan dimaksud.

3) Strategi Dan Upaya Represif

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara Non Yustisi**,** meliputi

a. Pelaksanaan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota melalui pembinaan secara Non yustisi.
b. Penanganan pelanggaran dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi, baik berupa teguran, peringatan, penghentian fungsi, pembongkaran maupun bentuk sanksi lain.
c. Pelaksanaan Operasi Terpadu

   Terlaksananya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dan terpadu dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait dalam mendukung penegakan perda dan perkada. Pelaksanaan operasi terpadu dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, TNI) serta linmas, termasuk dukungan dari OPD teknis Pembina dan Pengawas perda.
d. Pengendalian kegiatan Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP pada kemantren.

   Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berdasarkan instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2014 tentang Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan se-Kota Yogyakarta telah menugaskan anggota Satpol PP di 14 (empat belas) Kemantren se-Kota Yogyakarta denganjumlah 5 – 7 orang personil per-Kemantren. Penugasan personil ini diharapkan dapat mendeteksi dan menangani pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota secara cepat berdasarkan wilayah kemantrennya masing-masing. Penanganan pelanggaran yang dilaksanakanoleh Bawah Kendali Operasi (BKO) Satpol PP antara lain pelanggaran Pedagang Kaki Lima, Persetujuan Bangunan Gedung, reklame insidentil, pondokan serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lainnya.
e. Pelaksanaan pengendalian Kawasan tertib dan Kawasan Wisata dengan didukung personil outsourcing

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara Yustisi, dengan kegiatan :

a. Operasi yustisi

   Operasi yustisi dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada

Satuan Polisi Pamong Praja melalui operasi penyelidikan terhadap orang/badan yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

b. Pemanggilan pelanggar pelanggar perda dan perkada /saksi
Pemanggilan pelanggar pelanggar perda dan perkada /saksi dilaksanakan oleh PPNS terhadap orang/badan yang berkaitan langsung dan atau yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana.

c. Pemeriksaan dan penyidikan terduga pelanggar pelanggar perda dan perkada/saksi
Pemeriksaan pelanggar pelanggar perda dan perkada /saksi dilaksanakan guna mendapatkan keterangan, informasi dan bukti guna menentukan pelanggaran dan tersangkanya. Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah (BAPPPD).

d. Sidang pelanggaran Perda di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan setelah PPNS mengirimkan BAPPPD ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara non yustisi

e. Pendampingan penegakan perda bersanksi pidana dengan OPD Teknis Pembina dan Pengawas, termasuk dukungan kemantren dan kelurahan

f. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Bidang Cukai sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) melalui kegiatan Operasi bersama khususnya cukai rokok ilegal, bersama dengan Kanwil Bea Cukai DIY dan aparat penegak hukum lainnya;

4) Penguatan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan dan Pengawasan Internal serta Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan linmas

a. Penyusunan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan.
Mengkaji Perda atau Perkada masih relevan atau tidak dengan peraturan perundangan yang ada saat ini.

b. Peningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP dan petugas linmas melalui kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan diantaranya :
- Workshop Jabatan Fungsional Pol PP,
- Coaching clinic PPNS,
- Pembekalan pengetahuan dan ketugasan Satlinmas
- Pelatihan Dasar Rescue Linmas
- Pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis petugas Pol PP dan linmas melalui kegiatan kesamaptaan
- Pemahaman/diseminasi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pendukung ketugasan

c. Pengembangan kapasitas SDM Pol PP melalui pengajuan usulan Diklat Jabatan Fungsional Pol PP, Diklat Dasar Pol PP, Diklat Alih Jenjang, dan Diklat PPNS kepada OPD Pengampu kediklatan dan pelatihan (BKPSDM)
d. Peningkatan Kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP. Monitoring dan evaluasi oleh Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP serta Bimbingan konseling petugas Pol PP.

Di dalam melaksanakan strategi tersebut di atas, diperlukan penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta. Penahapan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta pada tabel berikut:

Tabel 3.2 .Penahapan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi internal, penguatan regulasi serta penguatan kerja sama dan komitmen para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penguatan SDM personil dan kolaborasi lintas sektor	Akselerasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui modernisasi sistem, percepatan penegakan peraturan, dan keterlibatan aktif masyarakat yang lebih luas	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan modern, adaptif, dan berdaya dukung penuh terhadap visi Kota Yogyakarta	menjadikan Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai role model nasional penegakan ketenteraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat & teknologi terintegrasi

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melalui :		

1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Melaksanakan patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas	
			Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas	
			Patroli pencegahan gangguan tibumtranmas	
			Melaksanakan pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
		Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara non yustisi	
			Menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara yustisi	
			Menyediakan Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	
		Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Melaksanakan peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta	
			Melaksanakan fungsi dan ketugasan petugas linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas	
			Melaksanakan monitoring kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP	

		Meningkatkan kerja sama penegakan hukum	Melaksanakan optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan aparatur penegak peraturan lainnya (Kepolisian, TNI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Inspektorat)	
	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif		Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Satpol PP	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM, terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
      2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
      3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
      4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas.
      5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan.
      6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
      7) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah.
   b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, diantaranya :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD,
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. terdiri dari 8 sub kegiatan, diantaranya :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan, yakni :
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD,
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD,

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yakni
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Terdiri dari 1 sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. terdiri dari 3 sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan,
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Seksi Deteksi Cegah Dini, kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, sub kegiatan Pembinaan Jagawarga.

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat		Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Pencegahan Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Pencegahan Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
			Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya deteksi dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas		1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya deteksi dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya kampung yang memiliki kelompok jagawarga dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya pembinaan kelompok jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga	
						2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Satpol PP		Nilai SAKIP Satpol PP	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Satpol PP	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing- masing program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana terlampir dalam Tabel 4.2 berikut :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				48.343.312.342,00		46.821.496.121,00		48.132.730.201,00		49.354.428.445,00		50.696.160.412,00		52.441.902.961,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.511.195.942,00		18.556.831.521,00		19.293.181.054,00		19.782.877.884,00		20.320.688.178,00		21.020.439.198,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP (Predikat)	A	A	20.511.195.942,00	A	18.556.831.521,00	A	19.293.181.054,00	A	19.782.877.884,00	A	20.320.688.178,00	A	21.020.439.198,00	1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Nilai SPIP Satpol PP (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP (Nilai)	80.96	82.50		82.50		83.50		84.50		85.50		85.50			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.978.100,00		42.008.800,00		42.861.000,00		43.929.000,00		45.111.000,00		46.642.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP (Persen)	100	100	42.978.100,00	100	42.008.800,00	100	42.861.000,00	100	43.929.000,00	100	45.111.000,00	100	46.642.000,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Satpol PP (Persen)	N/A	100		100		100		100		100		100			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.881.800,00		1.055.000,00		1.076.000,00		1.102.000,00		1.131.000,00		1.169.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.881.800,00	3	1.055.000,00	3	1.076.000,00	3	1.102.000,00	3	1.131.000,00	3	1.169.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				936.000,00		798.000,00		814.000,00		834.000,00		856.000,00		885.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	936.000,00	1	798.000,00	1	814.000,00	1	834.000,00	1	856.000,00	1	885.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				511.000,00		520.000,00		530.000,00		543.000,00		557.000,00		575.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	511.000,00	1	520.000,00	1	530.000,00	1	543.000,00	1	557.000,00	1	575.000,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				292.400,00		443.000,00		452.000,00		463.000,00		475.000,00		491.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	292.400,00	1	443.000,00	1	452.000,00	1	463.000,00	1	475.000,00	1	491.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				159.800,00		443.000,00		452.000,00		463.000,00		475.000,00		491.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	159.800,00	1	443.000,00	1	452.000,00	1	463.000,00	1	475.000,00	1	491.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				38.056.600,00		37.701.800,00		38.468.000,00		39.429.000,00		40.493.000,00		41.869.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	38.056.600,00	4	37.701.800,00	4	38.468.000,00	4	39.429.000,00	4	40.493.000,00	4	41.869.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.140.500,00		1.048.000,00		1.069.000,00		1.095.000,00		1.124.000,00		1.162.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.140.500,00	4	1.048.000,00	4	1.069.000,00	4	1.095.000,00	4	1.124.000,00	4	1.162.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.234.021.100,00		16.140.027.815,00		16.826.892.054,00		17.254.945.884,00		17.724.521.178,00		18.336.013.198,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP (Nilai)	5	5	18.234.021.100,00	5	16.140.027.815,00	5	16.826.892.054,00	5	17.254.945.884,00	5	17.724.521.178,00	5	18.336.013.198,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.230.999.000,00		16.138.035.715,00		16.824.861.054,00		17.252.866.884,00		17.722.390.178,00		18.333.812.198,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	141	137	16.138.035.715,00	135	16.138.035.715,00	135	16.824.861.054,00	135	17.252.866.884,00	135	17.722.390.178,00	135	18.333.812.198,00		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				457.500,00		277.500,00		283.000,00		290.000,00		297.000,00		307.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	457.500,00	2	277.500,00	2	283.000,00	2	290.000,00	2	297.000,00	2	307.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				457.500,00		277.500,00		283.000,00		290.000,00		297.000,00		307.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	457.500,00	3	277.500,00	3	283.000,00	3	290.000,00	3	297.000,00	3	307.000,00		
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				457.000,00		277.500,00		283.000,00		290.000,00		297.000,00		307.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	457.000,00	1	277.500,00	1	283.000,00	1	290.000,00	1	297.000,00	1	307.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				444.900,00		264.900,00		270.000,00		276.000,00		283.000,00		292.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	444.900,00	1	264.900,00	1	270.000,00	1	276.000,00	1	283.000,00	1	292.000,00		
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				379.900,00		259.900,00		265.000,00		271.000,00		278.000,00		287.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	379.900,00	2	259.900,00	2	265.000,00	2	271.000,00	2	278.000,00	2	287.000,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				379.900,00		369.900,00		377.000,00		386.000,00		396.000,00		409.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	379.900,00	12	369.900,00	12	377.000,00	12	386.000,00	12	396.000,00	12	409.000,00		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				444.900,00		264.900,00		270.000,00		276.000,00		283.000,00		292.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	444.900,00	2	264.900,00	2	270.000,00	2	276.000,00	2	283.000,00	2	292.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.130.000,00		2.640.000,00		3.030.000,00		3.102.000,00		3.180.000,00		3.288.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP (Nilai)	5	5	5.130.000,00	5	2.640.000,00	5	3.030.000,00	5	3.102.000,00	5	3.180.000,00	5	3.288.000,00		
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				855.000,00		495.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	855.000,00	2	495.000,00	2	505.000,00	2	517.000,00	2	530.000,00	2	548.000,00		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				855.000,00		495.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	855.000,00	2	495.000,00	2	505.000,00	2	517.000,00	2	530.000,00	2	548.000,00		
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				855.000,00		495.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	855.000,00	1	495.000,00	1	505.000,00	1	517.000,00	1	530.000,00	1	548.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				855.000,00		165.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	855.000,00	2	165.000,00	2	505.000,00	2	517.000,00	2	530.000,00	2	548.000,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				855.000,00		495.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	855.000,00	2	495.000,00	2	505.000,00	2	517.000,00	2	530.000,00	2	548.000,00		
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				855.000,00		495.000,00		505.000,00		517.000,00		530.000,00		548.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	855.000,00	2	495.000,00	2	505.000,00	2	517.000,00	2	530.000,00	2	548.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				396.126.900,00		396.126.900,00		404.184.000,00		414.288.000,00		425.472.000,00		439.937.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP (Nilai)	76,62	76,63	396.126.900,00	76,64	396.126.900,00	76,65	404.184.000,00	76,66	414.288.000,00	76,67	425.472.000,00	76,68	439.937.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.550.000,00		395.283.000,00		403.323.000,00		413.406.000,00		424.567.000,00		439.002.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	20.550.000,00	2	395.283.000,00	2	403.323.000,00	2	413.406.000,00	2	424.567.000,00	2	439.002.000,00		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.203.900,00		843.900,00		861.000,00		882.000,00		905.000,00		935.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	1.203.900,00	2	843.900,00	2	861.000,00	2	882.000,00	2	905.000,00	2	935.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				348.274.842,00		304.774.206,00		310.970.000,00		318.741.000,00		327.344.000,00		338.471.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP (Nilai)	90,47	90,5	348.274.842,00	90,53	304.774.206,00	90,56	310.970.000,00	90,6	318.741.000,00	90,65	327.344.000,00	91	338.471.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				18.451.250,00		20.458.700,00		20.874.000,00		21.395.000,00		21.972.000,00		22.719.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	8	18.451.250,00	8	20.458.700,00	8	20.874.000,00	8	21.395.000,00	8	21.972.000,00	8	22.719.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				136.789.390,00		98.492.126,00		100.495.000,00		103.007.000,00		105.788.000,00		109.384.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	5	136.789.390,00	5	98.492.126,00	5	100.495.000,00	5	103.007.000,00	5	105.788.000,00	5	109.384.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.453.202,00		15.215.380,00		15.524.000,00		15.912.000,00		16.341.000,00		16.896.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	20	17.453.202,00	20	15.215.380,00	20	15.524.000,00	20	15.912.000,00	20	16.341.000,00	20	16.896.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.875.000,00		106.230.000,00		108.390.000,00		111.099.000,00		114.098.000,00		117.977.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18	17	99.875.000,00	17	106.230.000,00	17	108.390.000,00	17	111.099.000,00	17	114.098.000,00	17	117.977.000,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		1.392.000,00		1.420.000,00		1.455.000,00		1.494.000,00		1.544.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.000.000,00	2	1.392.000,00	2	1.420.000,00	2	1.455.000,00	2	1.494.000,00	2	1.544.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.706.000,00		62.986.000,00		64.267.000,00		65.873.000,00		67.651.000,00		69.951.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	87	72.706.000,00	87	62.986.000,00	87	64.267.000,00	87	65.873.000,00	87	67.651.000,00	87	69.951.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		55.375.000,00		56.501.000,00		57.913.000,00		59.476.000,00		61.498.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP (Nilai)	-	-	-	5	55.375.000,00	5	56.501.000,00	5	57.913.000,00	5	59.476.000,00	5	61.498.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		55.375.000,00		56.501.000,00		57.913.000,00		59.476.000,00		61.498.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	6	55.375.000,00	6	56.501.000,00	6	57.913.000,00	6	59.476.000,00	6	61.498.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				375.170.400,00		315.770.000,00		322.192.000,00		330.246.000,00		339.161.000,00		350.690.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP (Persentase)	100	100	375.170.400,00	100	315.770.000,00	100	322.192.000,00	100	330.246.000,00	100	339.161.000,00	100	350.690.000,00		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.900.000,00		6.900.000,00		7.040.000,00		7.216.000,00		7.410.000,00		7.661.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.900.000,00	12	6.900.000,00	12	7.040.000,00	12	7.216.000,00	12	7.410.000,00	12	7.661.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.400.000,00		30.000.000,00		30.610.000,00		31.375.000,00		32.222.000,00		33.317.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	89.400.000,00	12	30.000.000,00	12	30.610.000,00	12	31.375.000,00	12	32.222.000,00	12	33.317.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				278.870.400,00		278.870.000,00		284.542.000,00		291.655.000,00		299.529.000,00		309.712.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	278.870.400,00	12	278.870.000,00	12	284.542.000,00	12	291.655.000,00	12	299.529.000,00	12	309.712.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.483.867.600,00		1.300.108.800,00		1.326.551.000,00		1.359.713.000,00		1.396.423.000,00		1.443.900.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP (Nilai)	5	5	1.483.867.600,00	5	1.300.108.800,00	5	1.326.551.000,00	5	1.359.713.000,00	5	1.396.423.000,00	5	1.443.900.000,00		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.748.000,00		41.748.000,00		42.597.000,00		43.661.000,00		44.839.000,00		46.363.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	41.748.000,00	1	41.748.000,00	1	42.597.000,00	1	43.661.000,00	1	44.839.000,00	1	46.363.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.191.569.600,00		1.113.600.800,00		1.136.251.000,00		1.164.657.000,00		1.196.102.000,00		1.236.769.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	66	1.191.569.600,00	66	1.113.600.800,00	67	1.136.251.000,00	67	1.164.657.000,00	67	1.196.102.000,00	67	1.236.769.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.550.000,00		74.760.000,00		76.280.000,00		78.187.000,00		80.298.000,00		83.028.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	86	55.550.000,00	89	74.760.000,00	90	76.280.000,00	92	78.187.000,00	94	80.298.000,00	96	83.028.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.000.000,00		70.000.000,00		71.423.000,00		73.208.000,00		75.184.000,00		77.740.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	195.000.000,00	1	70.000.000,00	1	71.423.000,00	1	73.208.000,00	1	75.184.000,00	1	77.740.000,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.832.116.400,00		28.264.664.600,00		28.839.649.147,00		29.571.550.561,00		30.375.472.234,00		31.421.463.763,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas (Persen)	64,63	74,95	708.873.000,00	74,95	582.510.500,00	80,63	594.358.000,00	86,21	609.216.000,00	91,80	625.663.000,00	97,69	646.934.000,00	1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				17.594.989.400,00		17.952.328.600,00		18.337.461.147,00		18.786.411.561,00		19.299.136.234,00		19.968.533.763,00		
Meningkatnya Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan (Persen)	25	37,5	-	50	-	62,5	-	75	-	87,5	-	100	-		
Meningkatnya Kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP	Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP (Persen)	76,64	78,1	85.810.000,00	81,75	39.361.500,00	85,4	40.162.000,00	89,05	41.166.000,00	92,7	42.277.000,00	96,35	43.714.000,00		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				85.810.000,00		39.361.500,00		40.162.000,00		41.166.000,00		42.277.000,00		43.714.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	13	12	85.810.000,00	12	39.361.500,00	12	40.162.000,00	12	41.166.000,00	12	42.277.000,00	12	43.714.000,00		
Meningkatnya Standar Kompetensi SDM aparatur Pol PP	Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya (Persen)	90,23	95,28	615.671.000,00	95,48	531.932.000,00	95,9	542.751.000,00	96,05	556.319.000,00	96,25	571.339.000,00	96,5	590.764.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas Linmas	Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas (Persen)	11,29	26,08	-	38,17	-	52,96	-	67,74	-	82,53	-	100	-		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				615.671.000,00		531.932.000,00		542.751.000,00		556.319.000,00		571.339.000,00		590.764.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	400	400	615.671.000,00	235	531.932.000,00	235	542.751.000,00	235	556.319.000,00	235	571.339.000,00	235	590.764.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				7.392.000,00		11.217.000,00		11.445.000,00		11.731.000,00		12.047.000,00		12.456.000,00		
Meningkatnya Standar Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang dibina (Persen)	100	100	7.392.000,00	100	11.217.000,00	100	11.445.000,00	100	11.731.000,00	100	12.047.000,00	100	12.456.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				7.392.000,00		11.217.000,00		11.445.000,00		11.731.000,00		12.047.000,00		12.456.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1	11.217.000,00	1	11.217.000,00	1	11.445.000,00	1	11.731.000,00	1	12.047.000,00	1	12.456.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat (Persen)	80.49	87.25	6.395.178.000,00	87.25	5.649.131.000,00	89.86	5.807.133.000,00	92.47	5.952.311.000,00	95.08	6.113.023.000,00	97.69	6.320.865.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.594.989.400,00		17.952.328.600,00		18.337.461.147,00		18.786.411.561,00		19.299.136.234,00		19.968.533.763,00		
Meningkatnya pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas	Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas (Persen)	178	199	1.793.562.000,00	199	1.375.758.000,00	104	1.446.840.000,00	109	1.483.011.000,00	114	1.523.052.000,00	119	1.574.835.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.793.562.000,00		1.375.758.000,00		1.446.840.000,00		1.483.011.000,00		1.523.052.000,00		1.574.835.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	178	193	1.793.562.000,00	199	1.375.758.000,00	104	1.446.840.000,00	109	1.483.011.000,00	114	1.523.052.000,00	119	1.574.835.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas	Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas (Persen)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
	Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas (Persen)	100	100	4.601.616.000,00	100	4.273.373.000,00	100	4.360.293.000,00	100	4.469.300.000,00	100	4.589.971.000,00	100	4.746.030.000,00		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				4.601.616.000,00		4.273.373.000,00		4.360.293.000,00		4.469.300.000,00		4.589.971.000,00		4.746.030.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	13	13	4.601.616.000,00	12	4.273.373.000,00	12	4.360.293.000,00	12	4.469.300.000,00	12	4.589.971.000,00	12	4.746.030.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada (Persen)	100	100	10.304.735.000,00	100	10.451.119.000,00	100	10.640.643.000,00	100	10.923.408.000,00	100	11.214.289.000,00	100	11.590.474.000,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.594.989.400,00		17.952.328.600,00		18.337.461.147,00		18.786.411.561,00		19.299.136.234,00		19.968.533.763,00		
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisial	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi (Persen)	100	100	75.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		1	75.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				10.229.735.000,00		10.301.119.000,00		10.490.643.000,00		10.773.408.000,00		11.064.289.000,00		11.440.474.000,00		
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisial	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi (Persen)	100	100	9.765.287.000,00	100	9.813.061.000,00	100	9.992.658.000,00	100	10.262.974.000,00	100	10.540.074.000,00	100	10.898.436.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisial			9.765.287.000,00		9.813.061.000,00		9.992.658.000,00		10.262.974.000,00		10.540.074.000,00		10.898.436.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	13	12	9.765.287.000,00	12	9.813.061.000,00	12	9.992.658.000,00	12	10.262.974.000,00	12	10.540.074.000,00	12	10.898.436.000,00		
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Yustisial	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi (Persen)	100	100	464.448.000,00	100	488.058.000,00	100	497.985.000,00	100	510.434.000,00	100	524.215.000,00	100	542.038.000,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				464.448.000,00		488.058.000,00		497.985.000,00		510.434.000,00		524.215.000,00		542.038.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	464.448.000,00	12	488.058.000,00	12	497.985.000,00	12	510.434.000,00	12	524.215.000,00	12	542.038.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Persen)	100	100	10.423.330.400,00	100	11.581.904.100,00	100	11.817.479.000,00	100	12.112.915.000,00	100	12.439.963.000,00	100	12.862.921.000,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.594.989.400,00		17.952.328.600,00		18.337.461.147,00		18.786.411.561,00		19.299.136.234,00		19.968.533.763,00		
Meningkatnya deteksi dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini (Persen)	100	100	169.566.000,00	100	245.206.000,00	100	250.193.000,00	100	256.447.000,00	100	263.371.000,00	100	272.325.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				169.566.000,00		245.206.000,00		250.193.000,00		256.447.000,00		263.371.000,00		272.325.000,00		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	44	36	169.566.000,00	69	245.206.000,00	69	250.193.000,00	99	256.447.000,00	129	263.371.000,00	48	272.325.000,00		
Meningkatnya Pencegahan Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan (Persen)	100	100	10.253.764.400,00	100	11.336.698.100,00	100	11.547.222.147,00	100	11.830.168.561,00	100	12.159.126.234,00	100	12.590.865.763,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				10.253.764.400,00		11.336.698.100,00		11.547.222.147,00		11.830.168.561,00		12.159.126.234,00		12.590.865.763,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Laporan)	161	126	10.253.764.400,00	127	11.336.698.100,00	127	11.547.222.147,00	157	11.830.168.561,00	217	12.159.126.234,00	126	12.590.865.763,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-		227.360.000,00		-		-		-		-		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				-		227.360.000,00		-		-		-		-		
Meningkatnya kampung yang memiliki kelompok jagawarga dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkan (Persen)	100	100	-	100	227.360.000,00	100	-	100	-	100	-	100	-	1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				-		227.360.000,00		-		-		-		-		
Meningkatnya pembinaan kelompok jagawarga	Persentase kelompok jagawarga yang dilakukan pembinaan (Persen)	N/A	N/A	-	100	227.360.000,00	100	-	100	-	100	-	100	-		
2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga				-		227.360.000,00		-		-		-		-		
Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina (Orang)	-	-	-	169	227.360.000,00	169	-	169	-	169	-	169	-		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Strategis Wali Kota - Jogja Tangguh Bencana	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

1.	2.22.08- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Strategis Wali Kota - Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Meningkatnya kampung yang memiliki kelompok jagawarga dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0012 Pembinaan Jagawarga	

4.2.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Satpol PP Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.05.2.22.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja									
2.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks	N/A	70	75	80	85	90	91	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
4.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	90,61	92,17	93,67	95,02	96,36	97,7	99,08	

4.2.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 selama lima tahun ke depan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renstra ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025-2029.

SASARAN DAERAH
Meningkatnya Kondusivitas Daerah
IK : *Crime Rate*

TUJUAN OPD
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IK : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

SASARAN OPD
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
IK : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN OPD
2. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif
IK : Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 1

Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
IK : Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya deteksi dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
IK : Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini

Meningkatnya Pencegahan Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
IK : Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan

OUTPUT

Terlaksananya pengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung

IK : Jumlah laporan informasi bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan

Terlaksananya patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas

IK : Frekuensi patroli pengawasan dan pengamanan tertutup

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas

IK : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas

IK : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas

Tersusunnya peta kerawanan gangguan tibumtranmas

IK : Peta kerawanan gangguan tibumtranmas yang teridentifikasi

Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas

IK : Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas

Cross cutting ketugasan
1. Bakesbanggol selaku mitra kegiatan Deteksi dan Cegah Dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Dindikpora selaku OPD Pembina dan Pengawas pelajar sekolah
3. Kepolisian selaku mitra kerja pencegahan gangguan trantibum
4. TNI selaku mitra kerja kerja pencegahan gangguan trantibum

OUTPUT

Terlaksananya patroli pencegahan gangguan tibumtranmas

IK : Frekuensi patroli pencegahan gangguan tibumtranmas

Terlaksananya pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP)

IK : Jumlah pejabat/orang-orang penting yang dikawal

Terlaksananya pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materil, aset, lokasi, upacara/acara

IK : Jumlah personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara yang diamankan

Terlaksananya penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

IK : Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang terkendali

Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmas

IK : Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan pengendalian gangguan tibumtranmas

Cross cutting ketugasan
1. Kepolisian
2. TNI
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Kebudayaan

Dukungan terkait pengamanan event kegiatan, pengawalan pejabat, dan kejadian unjuk rasa serta patroli terpadu pencegahan gangguan trantibum

---

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 2

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
IK : Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Yustisial
IK : Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisial
IK : Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi

OUTPUT

Terlaksananya penyelidikan dugaan pelanggaran perda dan perkada

IK : Jumlah kasus dugaan pelanggaran perda perkada yang diselidiki

Terlaksananya pemanggilan terduga pelanggar perda perkada

IK : Jumlah surat panggilan terduga pelanggar perda perkada

Terlaksananya penyidikan pelanggaran perda dan perkada

IK : Jumlah kasus pelanggaran perda perkada yang disidik

Terlaksananya pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada

IK : Jumlah kasus pelanggaran perda perkada yang diperiksa

Terlaksananya pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada)

IK : Jumlah BAP pelanggaran perda perkada

Terlaksananya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait yang mendukung penegakan perda dan perkada

IK : Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan penegakan perda perkada yustisial

Cross cutting ketugasan
1. Kepolisian
2. TNI
3. Kejaksaan Negeri
4. Pengadilan Negeri
5. OPD Teknis Pembina dan Pengawas Perda dan Perkada

Dukungan terhadap penegakan perda dan perkada yang bersanksi pidana

OUTPUT

Terlaksananya pembinaan tindakan Non Yustisial

IK : Jumlah laporan pembinaan tindakan Non Yustisial

Terlaksananya patroli kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada

IK : Frekuensi patroli kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada

Tersusunnya peta kerawanan pelanggaran perda perkada

IK : Peta kerawanan pelanggaran perda perkada yang teridentifikasi

Tersusunnya SOP Penegakan Perda Perkada non yustisi

IK : Jumlah SOP Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisi yang berkualitas

Terlaksananya pemberian ganti kerugian terhadap WN yang terkena dampak akibat penegakan perda perkada

IK : Jumlah WN yang memperoleh ganti kerugian akibat dampak penegakan perda perkada

Terlaksananya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dan terpadu dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait dalam mendukung penegakan perda perkada

IK : Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan penegakan perda perkada non yustisial

Cross cutting ketugasan
1. Kepolisian
2. TNI
3. Kominfosan
4. OPD Teknis Pembina dan Pengawas Perda dan Perkada
5. Kemantren

Dukungan pembinaan dan pencegahan pelanggaran perda non yustisi

---

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 3

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP
IK : Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Standar Kompetensi SDM aparatur Pol PP
IK : Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya

OUTPUT

Terlaksananya diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan

IK :
1. Jumlah aparat Pol PP yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan pol pp
2. Jumlah Penyidik PNS yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan penyidikan

Terlaksananya pelatihan fisik dan keahlian aparat Satpol PP

IK : Jumlah aparat Pol PP yang mendapatkan pelatihan fisik dan keahlian teknis ketugasan

Cross cutting ketugasan
1. OPD Teknis pengampu Kepegawaian dan Pelatihan SDM
2. Kepolisian
3. TNI
4. Basarnas
5. BPBD
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Lembaga/institusi lain yang kompeten melaksanakan *tromfer knowledge* dan *skill* pendukung ketugasan Satpol PP

Dukungan kegiatan pengembangan kapasitas SDM petugas Pol PP

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas Linmas
IK : Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas

OUTPUT

Terlaksananya diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan linmas

IK : Jumlah petugas linmas yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan linmas

Terlaksananya pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis petugas linmas

IK : Jumlah petugas linmas yang mendapatkan pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis

Cross cutting ketugasan
1. Kemantren
2. Kelurahan
3. OPD Teknis pengampu Kepegawaian dan Pelatihan SDM
4. Kepolisian
5. TNI
6. Basarnas
7. BPBD
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. Lembaga/institusi lain yang kompeten melaksanakan transfer knowledge dan skill pendukung ketugasan linmas

Dukungan kegiatan pengembangan kapasitas SDM petugas linmas

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP
IK : Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP

OUTPUT

Terlaksananya ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI)

IK : Jumlah pegawai yang melanggar kode etik dan telah ditindak serta dibina

Terlaksananya bimbingan konseling petugas Satpol PP

IK : Jumlah petugas Satpol PP yang telah mengikuti konseling

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP

IK : Jumlah petugas Pol PP yang dipantau, diawasi, dan ditertibkan

Terlaksananya penyusunan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan

IK : Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang berkualitas

Cross cutting ketugasan
1. OPD Teknis pengampu Kepegawaian dan Pelatihan SDM
2. OPD Teknis pengampu Pengawasan
Penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. OPD Teknis pengampu tugas dan wewenang dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan

---

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 4

Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat
IK : Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas

IK :
1. Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, 10 linmas
2. Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam

Meningkatnya Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas

IK : Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas

OUTPUT

Terlaksananya pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas

IK : Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang terbentuk

Terlaksananya dukungan petugas linmas dalam membantu mewujudkan tibumtranmas

IK : Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas

Terlaksananya tugas perbantuan petugas linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

IK : Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan penanggulangan bencana dan kebakaran

Cross cutting ketugasan
1. Kemantren
2. Kelurahan
Selaku Koordinator Satgas dan Satlinmas Wilayah

Terlaksananya sosialisasi perda dan perkada di kampung dan sekolah

IK : Jumlah jenis perda dan perkada yang disosialisasikan

Terlaksananya perawatan Kampung Panca Tertib melalui rembug kampung panca tertib

IK : Jumlah Kampung Panca Tertib yang dirawat

Terlaksananya perawatan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah)

IK : Jumlah Sekolah Panca Tertib yang

Terlaksananya pencanangan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah)

IK : Jumlah Sekolah yang mencanangkan Panter Berkah

Tersusunnya peta daerah rawan pelanggaran perda dan perkada berbasis kampung

IK : Peta kerawanan pelanggaran perda dan perkada di wilayah kampung

Cross cutting ketugasan
1. OPD Teknis Pembina dan Pengawas Perda dan Perkada
2. Kemantren
3. Kelurahan
4. LPMK
5. Pengurus Kampung
6. Dindikpora

Dukungan koordinasi, mitra, sekaligus selaku objek maupun subjek yang turut aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas melalui kegiatan kampung panca tertib dan pantib for school

---

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP
Indikator Kinerja :
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP
IK :
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Satpol PP
IK :
Nilai Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Satpol PP
IK :
Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP

OUTPUT

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
IK : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

---

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 6

Meningkatnya Akuntabilitas Satpol PP
Indikator Kinerja:
1. Nilai SAKIP Satpol PP
2. Nilai SPIP Satpol PP

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP
IK :
Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP

Meningkatnya kematangan statistik sektoral Satpol PP
IK :
Persentase ketersediaan data statistik sektoral Satpol PP

OUTPUT

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaanan perangkat daerah

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Data Statistik Sektoral Sesuai Ketentuan
IK : Jumlah dokumen Data Statistik Sektoral SKPD

INTERMEDIATE OUTCOME CSF 7

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Satpol PP
Indikator Kinerja:
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset

INITIAL OUTCOME

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Satpol PP
IK :
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Satpol PP
IK :
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP

OUTPUT

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

OUTPUT

Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IK :Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
IK : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK :Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Cross cutting ketugasan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

CASCADING RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Komposit dari penjumlahan pemenuhan Dimensi Strategi (Bobot 0,198), Sumber Daya (Bobot 0,49), dan Sistem (0,312)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Komposit Realisasi Kinerja : 30% Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat + 30% Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + 30% Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat + 10% Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	(Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan serta deteksi cegah dini / potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta) x 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya deteksi dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini	(Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui deteksi cegah dini / potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta) X 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya pengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung	Jumlah laporan informasi bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Seksi Deteksi dan Cegah Dini
																				Terlaksananya patroli pengawasan dan pengamanan tertutup	Frekuensi patroli pengawasan dan pengamanan tertutup	
																				Tersusunnya peta kerawanan gangguan tibumtranmas	Peta kerawanan gangguan tibumtranmas yang	
																				Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam deteksi dan cegah dini	Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas	
															Meningkatnya Pencegahan Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya patroli pencegahan gangguan tibumtranmas	Frekuensi patroli pencegahan gangguan tibumtranmas	Seksi Pengamanan
																				Terlaksananya pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP)	Jumlah pejabat/orang-orang penting yang dikawal	
																				Terlaksananya pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara	Jumlah personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara yang diamankan	
																				Terlaksananya penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang terkendali	
																				Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmas	Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan pengendalian gangguan tibumtranmas	
										Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisi dan non yustisi) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Yustisial	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisi) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yustisi) x 100%	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya penyelidikan dugaan pelanggaran perda dan perkada	Jumlah kasus dugaan pelanggaran perda perkada yang diselidiki	Kepala Seksi Penyidikan
																				Terlaksananya pemanggilan terduga pelanggar perda perkada	Jumlah surat panggilan terduga pelanggar perda perkada	
																				Terlaksananya penyidikan pelanggaran perda dan perkada	Jumlah kasus pelanggaran perda perkada yang disidik	
																				Terlaksananya pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada	Jumlah kasus pelanggaran perda perkada yang diperiksa	

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																				Terlaksananya pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada)	Jumlah BAP pelanggaran perda perkada	
																				Terlaksananya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait yang mendukung penegakan perda dan perkada	Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan penegakan perda perkada yustisial	
															Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisial	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara non yustisi) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada non yustisi) x 100%		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan/sosialisasi tindakan Non Yustisial	Jumlah pelanggar yang dibina/mendapatkan sosialisasi secara Non Yustisial	Kepala Seksi Pengedalian Operasional
																				Terlaksananya patroli kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada	Frekuensi patroli kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada	
																				Tersusunnya peta kerawanan pelanggaran perda perkada	Peta kerawanan pelanggaran perda perkada yang teridentifikasi	
																				Tersusunnya SOP Penegakan Perda Perkada non yustisi	Jumlah SOP Penegakan Perda dan Perkada Non Yustisi yang berkualitas	
																				Terlaksananya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dan terpadu dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait dalam mendukung penegakan perda perkada	Frekuensi keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan penegakan perda perkada non yustisial	
																			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Terlaksananya pemberian ganti kerugian terhadap WN yang terkena dampak akibat penegakan perda perkada	Jumlah WN yang memperoleh ganti kerugian akibat dampak penegakan perda perkada	
										Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	(25% masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, minimal 10 linmas + 25% Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas + 50% persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas)	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas	Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas	Jumlah kampung yg memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung minimal 10 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50%	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas	Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang terbentuk	Kepala Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas
																Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas	Realisasi keikutsertaan anggota satgas linmas dalam mobilisasi ketugasan perbantuan trantibum dengan bobot 50%			Terlaksananya dukungan petugas linmas dalam membantu mewujudkan tibumtranmas	Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas	
																				Terlaksananya tugas perbantuan petugas linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan penanggulangan bencana dan kebakaran	

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
															Meningkatnya pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas	Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas	(30% Persentase Pencanangan kampung panca tertib) + (30% Persentase Pencanangan sekolah panca tertib) + (20% Pendampingan Perawatan kampung panca tertib) + (20% Pendampingan Perawatan sekolah panca		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya sosialisasi perda dan perkada di kampung dan sekolah	Jumlah jenis perda dan perkada yang disosialisasikan	Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat
																				Terlaksananya perawatan Kampung Panca Tertib melalui rembug kampung panca tertib	Jumlah Kampung Panca Tertib yang dirawat	
																				Terlaksananya perawatan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah)	Jumlah Sekolah Panca Tertib yang dirawat	
																				Terlaksananya pencanangan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah)	Jumlah Sekolah yang mencanangkan Panter Berkah	
																				Tersusunnya peta daerah rawan pelanggaran perda dan perkada berbasis kampung	Peta kerawanan pelanggaran perda dan perkada di wilayah kampung	
										Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas	40% SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya + 10% peningkatan kompetensi SDM anggota linmas + 25% pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP + 25% Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Standar Kompetensi SDM aparatur Pol PP	Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya	(Persentase anggota yang memahami peraturan + Persentase anggota yang lulus samapta) /2	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan	Jumlah aparat Pol PP yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan pol pp	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
																				Terlaksananya pelatihan fisik dan keahlian aparat Satpol PP	Jumlah aparat Pol PP yang mendapatkan pelatihan fisik dan keahlian teknis	
															Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas Linmas	Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas	Jumlah petugas linmas yg lulus pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas/Jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas dalam periode renstra X 100%			Terlaksananya diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan linmas	Jumlah petugas linmas yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan linmas	
																				Terlaksananya pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis petugas linmas	Jumlah petugas linmas yang mendapatkan pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis	
															Meningkatnya Kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP	Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP	(Jumlah pegawai yg mematuhi kode etik Satpol PP / Jumlah pegawai Satpol PP x 100%		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI)	Jumlah pegawai yang melanggar kode etik dan telah ditindak serta dibina	Kepala Seksi Pembinaan SDM
																				Terlaksananya bimbingan konseling petugas Saptol PP	Jumlah petugas Satpol PP yang telah mengikuti konseling	
																				Terlaksananya pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas	Jumlah petugas Satpol PP yang dipantau, diawasi, dan ditertibkan	
															Meningkatnya Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan	(jumlah peraturan perundang-undangan yg dikaji/ Target jumlah peraturan perundang-undangan periode renstra) x			Terlaksananya penyusunan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan	Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang berkualitas	

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
														Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kabupaten /Kota	Meningkatnya Standar Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang dibina	(Jumlah PPNS yang dibina / jumlah PPNS) x 100%		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya diseminasi informasi dan pengetahuan ketugasan	Jumlah Penyidik PNS yang mengikuti diseminasi informasi dan pengetahuan penyidikan	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
									PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kampung yang memiliki kelompok jagawarga dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkan	(Jumlah Kampung yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang telah dikukuhkan / jumlah kampung) x 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Meningkatnya pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas	Persentase Pembinaan Kelompok Jagawarga	(jumlah kelompok jagawarga yang dibina) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pembinaan Jagawarga	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan pencegahan gangguan tibumtranmas	Kepala Seksi Deteksi dan Cegah Dini
					Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris Satpol PP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun) dikali 100%	Sekretaris Satpol PP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencananaan perangkat daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Penganggaran
											Nilai SPIP Satpol PP	Hasil Penilaian SPIP oleh Inspektorat							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
											Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
																			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	
																			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
																			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
															Meningkatnya kematangan statistik sektoral Satpol PP	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Satpol PP	(Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral) dikali 100%	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Data Statistik Sektoral Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Data Statistik Sektoral SKPD	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Penganggaran
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Satpol PP	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP oleh BPKAD	Sekretaris Satpol PP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan
																			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
																			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
																			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	
																			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP oleh BPKAD	Sekretaris Satpol PP	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
																			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	
																			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
																			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP	Hasil nilai IP ASN Satpol PP	Sekretaris Satpol PP	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP	Hasil penilaian pengawasan dan penyelenggaraan kearsipan Satpol PP	Sekretaris Satpol PP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
																			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
																			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
																			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
																			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP oleh BPKAD	Sekretaris Satpol PP	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP	Jumlah belanja Satpol PP yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Satpol PP dikali 100%	Sekretaris Satpol PP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
																			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP oleh BPKAD	Sekretaris Satpol PP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
																			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
																			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta lengkap beserta usulan terkait target pendapatan, belanja dalam bentuk Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

Demikian Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan semoga dapat dipergunakan serta direalisasikan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 September 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

Taukhid, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197000929199003100 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1 1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan Renstra 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 31
3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 31
3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 32
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 33
3.4. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 38
3.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42
4.1. Uraian Program 42
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 106
BAB V PENUTUP 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta 17
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Golongan 19
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Eselon 19
Tabel 2.4. Tabel 2.4. Daftar Jenis Barang dan Kondisinya 20
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta 24
Tabel 2.6. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 29
Tabel 3.1. Sasaran Strategis Damkarmat Kota Yogyakarta..... 32
Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 32
Tabel 3.3. Sasaran Strategis Damkarmat Kota Yogyakarta..... 33
Tabel 3.4. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 34
Tabel 3.5. Penahapan Renstra PD..... 38
Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 40
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 43
Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah..... 48
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..... 54
Tabel 4.4. Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. Dalam RPJMD sebagaimana dimaksud diatas, Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2025 – 2029 yakni "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu "Adil Makmur", "Lestari" dan "Berkeadaban". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dengan masyarakat dan seluruh komponen pembangunan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, maupun moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Pembangunan Kota Yogyakarta 2025–2029 diarahkan sebagai sebuah gerakan bersama yang menjiwai pembangunan sehingga pembangunan Kota Yogyakarta menjadi lebih bernyawa. Sebagaimana makna gerakan yang berarti adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka hal tersebut dimakani serupa dengan gerakan bersama dalam pembangunan Kota Yogyakarta dari kondisi awal menuju kondisi baru sebagai perubahan nyata yang menunjukkan kondisi lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Gerakan kolektif tersebut dilakukan secara terpadu dan terarah di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menuju Visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta memiliki kontribusi terhadap pencapaian Misi ke-2 yaitu Mewujudkan *"Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas Dan Lingkungan Hidup Yang Lestari"*. Misi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih.

Secara teknis, perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029 dilakukan dengan mensinergikan misi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan misi Kepala Daerah yang terpilih. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kesinambungan pembangunan, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang.

Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek-

menengah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menerjemahkan amanat Visi dan Misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Ketentuan tentang amanat penyusunan Renstra 2025 – 2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Renstra disusun dengan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan; dan
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan serta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terdapat di Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran.

Tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi
    2. Seksi Penyuluhan dan Edukasi
d. Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
    1. Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran
    2. Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun

e. Unit Pelaksana Teknis

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

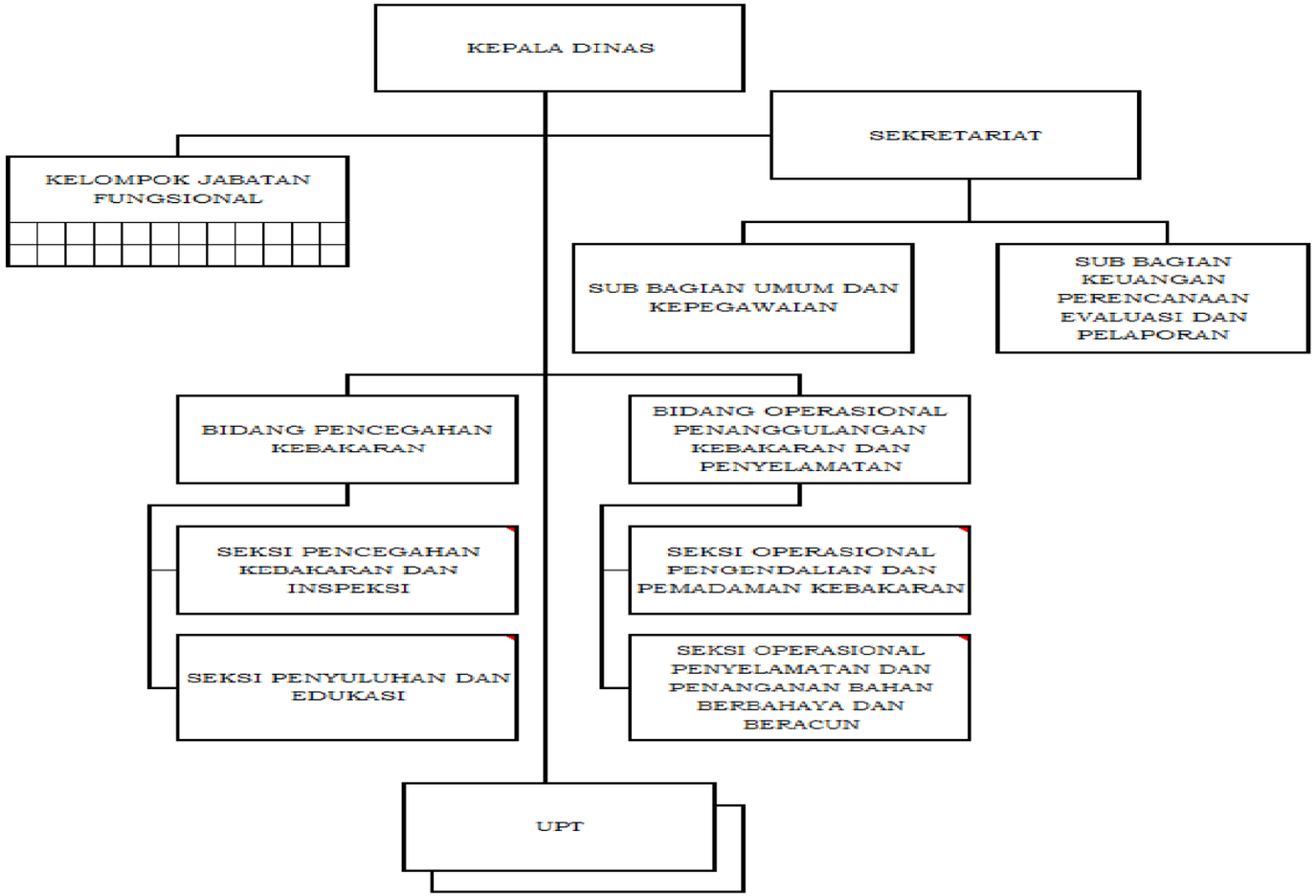

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
5. pengoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
6. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
7. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
9. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
11. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
12. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan ketugasannya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
4. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja kegiatan bidang dan seksi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
9. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
11. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
4. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
5. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
6. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
7. penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
8. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
9. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
11. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
12. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
13. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
14. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
15. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

b.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
3. penatausahaan keuangan Dinas;
4. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
5. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
6. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
7. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
8. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
10. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;

11. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
12. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
13. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

c. Bidang Pencegahan Kebakaran

Bidang Pencegahan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan kebakaran. Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kebakaran;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan edukasi;
6. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
7. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
8. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
9. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

c.1 Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi

Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran. Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi.

Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kebakaran dan inspeksi;
3. pelaksanaan pencegahan kebakaran dan inspeksi;
4. pelaksanaan pembinaan pencegahan kebakaran;
5. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan inspeksi dan peralatan proteksi kebakaran;
6. pelaksanaan penyusunan peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
7. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan instalasi peralatan proteksi kebakaran pada fasilitas umum;
8. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pencegahan kebakaran dan inspeksi;
9. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
11. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
12. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

c.2 Seksi Penyuluhan dan Edukasi

Seksi Penyuluhan dan Edukasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran. Seksi Penyuluhan dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan penyuluhan dan edukasi.

Seksi Penyuluhan dan Edukasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penyuluhan dan edukasi;
3. pelaksanaan penyuluhan dan edukasi pencegahan kebakaran;
4. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
6. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
7. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
8. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

d. Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

d.1 Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran

Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan operasional pemadaman dan penyelamatan.

Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
3. pelaksanaan operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
4. pelaksanaan fasilitasi operasional penunjang operasi pemadaman kebakaran;
5. pelaksanaan investigasi dan penyelidikan pada obyek dan lokasi kebakaran pasca operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
6. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
7. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana operasional pemadaman kebakaran;
8. pelaksanaan manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung;
9. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;

10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
11. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
12. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

d.2 Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
3. pelaksanaan pengendalian dan operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
4. pelaksanaan fasilitasi operasional penunjang operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
5. pelaksanaan investigasi dan penyelidikan pada obyek dan lokasi kebakaran pasca operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
6. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
7. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
8. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.1.2 Sumber Daya PD

2.1.2.1 Kepegawaian

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh 45 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan yang memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
A.	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	1	-
2	Sekretaris	1	S1	1	S2	1	-
3	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran	1	S1	1	S2	1	-
4	Kepala Bidang Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	S1	1	S2	1	-
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	1	-
6	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1	1	S1	-	1
7	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi	1	S1	1	S1	1	-
8	Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi	1	S1	1	S1	1	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
9	Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran	1	S1	1	S2	1	-
10	Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.	1	S1	1	S1	1	-
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
1	Analis Tata Usaha	1	S1	-	S1	-	-
2	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S1/D4	1	S1	1	
3	Analis Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	S1	-	-	-	-
4	Penyuluh Bencana	2	S1/D4	-	-	-	-
4	Analis Kebakaran	2	S1/D4	-	-	-	-
5	Investigator	2	S1/D4	1	S1	-	-
6	Pranata Kebakaran	18	SLTA	18	SLTA	18	-
C.	Fungsional Tertentu						
1	Pranata Komputer Terampil	1	D3	1	D3	-	1
2	Pemadam Kebakaran Pemula	68		-	-	-	-
3	Pemadam Kebakaran	27		-	-	-	-
4	Pemadam Kebakaran Mahir	15		12	SLTA	12	-
5	Pemadam Kebakaran Penyelia	4		-	-	-	-
6	Analis Kebakaran Ahli Pertama	2		-	-	-	-
D.	Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif						
	Bendahara	1	D3	1	D3	-	1
	Pengelola Gaji	1	D3	1	SLTA	1	-
	Verifikator Keuangan	1	D3	1	D3	-	1
	Pengelola Akutansi	1	D3	1	D3	1	-
	Pengolah Data Laporan Kas	1	D3	-	-	-	-
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	9	D3	1 4	S1 SLTA	- 4	1 -
	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	2	D3	2	SLTA	2	-
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	2	D3	1	SLTA	1	-
	Pengadministrasi Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian/ Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1	SLTA/D1/ D2/D3	1	SLTA	1	-
	Pengadministrasian Umum	1	SLTA/D1/D2 /D3	-	-	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/ Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor/ Penata Laksana Barang Terampil	4	SLTA/DI/D D2/D3	1	SLTA	1	-
	Pengadministrasi Keuangan	1	SLTA/DI/D D2/D3	-	-	-	-
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	SLTA/DI/D D2/D3	-	-	-	-
	Pramu Kebersihan	2	SLTA/DI/D D2/D3	-	-	-	-
	Pramu Bakti	1	SLTA/ sederajat	-	-	-	-

Kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 135 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 107 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 28 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 1 pegawai , SLTA sebanyak 86 pegawai, D3 sebanyak 6 pegawai, S1 sebanyak 11 pegawai, dan pendidikan tertinggi adalah S2 atau pascasarjana sebanyak 3 pegawai . Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia kurang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 95 orang atau 88,78% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 12 orang atau 11,22% dari jumlah total pegawai.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4
2	III	15
3	II	25
4	I	-
5	V (P3K)	25
Jumlah		69

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Eselon

No	Eselonn	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	3
4	IV	6
Jumlah		10

Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ideal didukung oleh 135 orang pegawai yaitu terdiri dari 10 orang Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum 38 orang, dan Jabatan Fungsional Tertentu 88 orang. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Bantuan maupun Tenaga Teknis Non PNS untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas - tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2.1.2.2 Perlengkapan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	AC	4	Unit
2	Air Lifting Bag Set	1	Unit
3	Air Purifier (CHT)	1	Buah
4	Tabung APAR	565	Buah
5	Alat pendeteksi banjir	1	Unit
6	Alat pengisian APAR	1	Unit
7	Lemari	123	Buah
8	Antena	4	Buah
9	AVL System set mobile radio frequency	2	Unit
10	BA compressor/pengisi tabung oksigen	1	Unit
11	Baju tahan api	8	Buah
12	Base station	1	Buah
13	Blower	2	Unit
14	Breathing appartus air /O2	5	Unit
15	Chainsaw	53	Unit
16	Camcoder MD 10000	1	Unit
17	Card video capture	1	Unit
18	Charger aki	1	Unit
19	Compressor	2	Unit
20	Concrete crusher set	1	Unit
21	Dispenser	3	Unit
22	Display/ running text	1	Unit
23	Dongkrak	2	Unit
24	Double Pulley (tandem speed)	5	Unit
25	Drag bar	77	Buah
26	EWWS	4	Unit
27	Exhaust fan (CHT)	2	Unit
28	Filling kabinet	20	Buah
29	Fire escape chute	1	Buah

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
30	Fire Helmet	78	Buah
31	Full face masker	10	Buah
32	Gantol	8	Buah
33	Gbr Presiden/ Wakil Presiden	1	Set
34	Genset	45	Unit
35	GM 338 transceiver	3	Unit
36	Imenta/ Gordyn dan rail	1	Unit
37	Grease pump	1	Unit
38	Handy talkie	238	Buah
39	HD external	10	Buah
40	Harness	30	Buah
41	Hose binder	1	Buah
42	Jaket tahan panas	75	Buah
43	Jam dinding	3	Buah
44	Jaring penyelamat	6	Buah
45	Kabel roll mee	2	Buah
46	Kaca mata + ear com	28	Buah
47	Kamera CCTV	1	Unit
48	Kamera foto difital SLR	3	Unit
49	Kamera video digital	1	Unit
50	Karpet	1	Buah
51	Kipas Angin	13	Unit
52	Komputer PC	16	Unit
53	Kursi	118	Buah
54	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah
55	Layar LCD	1	Unit
56	LCD Projector	2	Unit
57	TV	5	Unit
58	Locker	2	Buah
59	Master stream nozzle	9	Buah
60	Megaphone	5	Buah
61	Meja	53	Buah
62	Mesin faximile	1	Unit
63	Mesin ketik	3	Unit
64	Mesin pompa air	25	Unit
65	Mesin penyedot lumpur	3	Unit
66	Mesin presensi sidik jari	1	Unit
67	Mobil PK	9	Unit
68	Mobil Rescue PK	1	Unit
69	Monitor	5	Unit
70	Multi 25 M	1	Buah
71	Multigas detector	1	Buah

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
72	Notebook	6	Unit
73	Nozzle duduk/ groung monitor	1	Buah
74	Paket radio UHF	2	Unit
75	Pelampung model tabung	30	Buah
76	Perahu karet	1	Buah
77	Pesawat telepon	7	Unit
78	Peti uang	1	Buah
79	Pick up	2	Unit
80	Pompa air	24	Buah
81	Ponsel CDMA	1	Unit
82	Power cutter	1	Unit
83	Printer	8	Unit
84	Rak besi siku	5	Buah
85	Rescue set	2	Unit
86	Rig	14	Unit
87	Roll kabel 50m	2	Buah
88	Scanner	1	Unit
89	Senapan pelontar tali	1	Buah
90	Senter (Halogen)	25	Buah
91	Sepatu Harvick	80	Buah
92	Sepeda	2	Unit
93	Sepeda motor	60	Unit
94	Solar cell	3	Unit
95	Tation wagon	3	Unit
96	Tali carmantel	4	Buah
97	Tali dadung	4	Buah
98	Tangga Alumunium	1	Buah
99	Telemetri	1	Unit
100	Tenda komando	2	Buah
101	Topeng masker	60	Buah
102	Tower antena	2	Unit
103	Transceiver - transmiter	13	Unit
104	UHF wirelestuner	1	Unit
105	UPS	26	Unit
106	V belt	3	Unit
107	Vacuum	1	Unit
108	Vacuum cleaner	1	Unit
109	Vertical rescue	45	Unit
110	Whiteboard	2	Buah
111	WIFI LAN adapter	1	Unit
112	Wireless	2	Unit
113	Wireless acces point	1	Unit

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
114	Zice	1	Unit

2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam kapasitasnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran untuk itu telah dirumuskan beberapa indikator dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1.	Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase penanggulangan kebakaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase penyelamatan sesuai respon time	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan. Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan keadaan darurat. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah cuaca ekstrem dan kekeringan. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Yogyakarta menunjukkan nilai 64,22 pada tahun 2024, yang menempatkan wilayah ini dalam kategori risiko sedang. Jika ditinjau dalam tren lima tahun terakhir (2020–2024), IRB mengalami penurunan bertahap dari 72,86 menjadi 64,22, dengan rata-rata laju penurunan sebesar -3,11% per tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, dan perlu dijaga konsistensinya agar dampaknya semakin merata ke seluruh wilayah.

Lebih lanjut, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022–2026, terdapat tujuh jenis potensi ancaman bencana yang diidentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi, dan letusan gunung api.

Tingkat risiko kelas Tinggi untuk bahaya banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan kelas Sedang untuk bencana Kekeringan Meteorologi dan kelas Rendah untuk bahaya letusan gunung api. Prioritas bencana yang akan ditangani Kota Yogyakarta dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan menunjukkan bahwa prioritas bencana yang ditangani Kota Yogyakarta ialah cuaca ekstrem, gempa bumi, dan banjir.

Tingkat ketahanan terhadap bencana daerah diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah dengan 7 indikator yaitu, Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Selama periode 2022–2024, capaian indeks ini di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan bertahap dari 0,65 pada tahun 2022 menjadi 0,69 pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren positif, angka tersebut mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengurangan risiko bencana masih bersifat bertahap dan belum menyentuh seluruh aspek wilayah dan komunitas secara merata. Seperti terlihat dari beberapa indikator penyusun IKD tahun 2024, Indikator Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Yogyakarta yang memiliki klasifikasi kelas tinggi dengan nilai 0,93, Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Kota memiliki klasifikasi kelas sedang dengan nilai 0,68, Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Kota Yogyakarta memiliki klasifikasi kelas rendah dengan nilai 0,45 dan Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota Yogyakarta memiliki nilai sebesar 0,68 dengan klasifikasi kelas sedang.

Untuk perlindungan kawasan permukiman juga dibutuhkan perlindungan terhadap kebakaran dan adanya pelayanan terhadap penyelamatan manusia. salah satu contoh konkret adalah pembangunan hidran kering untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran di kawasan permukiman padat. Namun masih terdapat keterbatasan dalam penyediaannya. Hingga tahun 2024, baru terdapat 16 unit hidran kering yang dibangun dari 27 Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan realisasi pembangunan menjadi salah satu tantangan dalam memastikan perlindungan menyeluruh di wilayah rawan kebakaran.

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Yogyakarta menuntut sistem penanggulangan kebakaran yang cepat dan responsif. Pada tahun 2024, jumlah kejadian pemadaman kebakaran dalam kota yang ditangani dengan waktu tanggap maksimal 15 menit mencapai 71 kejadian. Di luar kebakaran, jumlah permintaan layanan penyelamatan dan evakuasi juga meningkat, dari 581 kejadian pada tahun 2023 menjadi 653 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap layanan penyelamatan non-kebakaran (seperti evakuasi hewan, banjir lokal, dan insiden di ruang publik) makin tinggi seiring kompleksitas kehidupan perkotaan. Dalam hal edukasi masyarakat, pendekatan jemput bola untuk penyuluhan kebencanaan berbasis kampung baru mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih berbasis kemantren, yang secara jangkauan dan intensitas dinilai belum cukup optimal untuk membangun budaya tanggap darurat di tingkat komunitas.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta juga melayani kegiatan layanan penunjang seperti pam, penyiraman, *standby*, simulasi dan kunjungan. Pelayanan penunjang yang diakomodasi Damkarmat Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 127 kali selanjutnya 103 kali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah layanan penunjang (pam, penyiraman, *standby*, simulasi dan kunjungan).

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana, kebakaran, dan penyelamatan di Kota Yogyakarta telah berjalan namun masih belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, infrastruktur darurat, sistem peringatan dini, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara aktif, agar sistem perlindungan bencana dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan tangguh dalam menghadapi ancaman yang semakin dinamis.

2.2.1 Isu Lingkungan

Dalam konteks pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika internal wilayah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang dinamis membawa dampak yang kompleks terhadap arah pembangunan kota, baik dalam bentuk peluang maupun risiko.

Pada skala global, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik global berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. Di tingkat nasional, Kota Yogyakarta diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian program-program prioritas

nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Sedangkan di tingkat regional, konteks keistimewaan DIY memberikan peranan penting bagi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dalam menjaga keberlanjutan dalam hal tata ruang, pelestarian budaya, maupun ketahanan lingkungan.

Memahami dinamika eksternal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan isu- isu strategis pembangunan. Oleh karena itu, isu pembakaran sampah berkontribusi besar pada bahaya kebakaran karena api dari pembakaran sampah dapat dengan mudah merambat ke semak-semak kering, tumpukan sampah lainnya, atau bahkan bangunan di sekitarnya, terutama saat musim kemarau, yang bisa menyebabkan kebakaran lahan atau rumah, menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Pembakaran sampah sering kali dilakukan secara sembarangan dan tidak terkontrol, memungkinkan api untuk menyebar dengan cepat ke material mudah terbakar lainnya, seperti dedaunan kering atau ilalang. Kondisi kering dan panas saat musim kemarau meningkatkan risiko perambatan api dari area pembakaran sampah ke area yang lebih luas, seperti lahan pertanian atau pemukiman. Api dari tumpukan sampah dapat merambat ke semak-semak dan lahan di sekitar, menciptakan kebakaran yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Kebakaran yang dimulai dari pembakaran sampah berpotensi meluas menjadi kebakaran lahan atau kebakaran rumah. Kebakaran yang tidak terkendali bisa menyebabkan korban jiwa dan kerusakan pada properti warga, menjadikannya ancaman serius bagi keselamatan.

Tindakan yang Harus Dilakukan yaitu Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah, apalagi di lahan terbuka. Jika ada sampah yang perlu diangkut, laporkan kepada pemerintah kota (melalui Dinas Lingkungan Hidup) agar sampah tersebut bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika kebakaran sudah terjadi, segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau Call Center Kedaruratan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap risiko kebakaran di musim kemarau dan aktif mencegahnya. Terapkan pengelolaan sampah yang baik sejak dari rumah, termasuk memilah sampah dan memanfaatkan fasilitas bank sampah.

2.2.2 Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak, sebagaimana ditegaskan dalam *Global Risks Report 2025* dan secara hukum internasional diatur dalam *Paris Agreement 2015*. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Laporan IPCC (*Sixth Assessment Report, 2021–2022*) memperkuat bukti bahwa intensitas perubahan iklim semakin cepat, dengan dampak yang menyebar di seluruh aspek ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata dan perubahan pola musim yang signifikan, memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan.

Di Kota Yogyakarta, perubahan iklim terpantau dalam bentuk peningkatan intensitas hujan dalam waktu singkat, musim kemarau yang lebih panjang, kenaikan suhu udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Hal ini meningkatkan

risiko banjir, memperburuk kondisi permukiman padat, mengancam keberlanjutan kawasan *heritage*, dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan jasa turut mengalami tekanan akibat ketidakpastian iklim ini.

Ketahanan kota menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Integrasi kebijakan pada seluruh aspek pembangunan kota dengan prinsip adaptasi dan mitigasi iklim menjadi keharusan, termasuk dalam rangka konservasi ruang hijau, pengelolaan air berkelanjutan, transisi energi bersih, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Tanpa pembangunan berbasis ketahanan iklim, risiko sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan kerusakan warisan budaya kota berpotensi akan semakin meningkat di masa depan.

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman utama jangka panjang di tingkat global, dengan fenomena semakin meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan suhu, dan kenaikan muka air laut. Kota-kota di seluruh dunia menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam konteks Kota Yogyakarta, perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada kawasan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular yang bersifat musiman, serta ancaman terhadap kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya yang sensitif terhadap fenomena perubahan iklim.

Tabel. 2.6. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Kota Yogyakarta memiliki masyarakat dengan semangat gotong royong dan jiwa sukarelawan yang tinggi 2. Stakeholder aktif memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi naiknya risiko kebakaran 2. Tingkat lalu-lintas yang padat memengaruhi capaian *response time* kejadian kebakaran 3. Bangunan dan infrastruktur yang menghambat akses masuk mobil pemadam kebakaran 4. Masih banyak bangunan gedung di Kota Yogyakarta yang belum memiliki sistem proteksi kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku 5. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan	Pengelolaan sampah yang belum optimal	1. Komitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) 2. Perubahan iklim global 3. Ketidakpastian kondisi ekonomi dunia	1. Tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan 2. Ketahanan sosial ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana 3. Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional	1. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 2. Menurunnya kualitas lingkungan 3. Penanganan masalah sampah 4. Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia	1. Penguatan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) 2. Penyederhanaan dan digitalisasi pada layanan subsektor kebakaran 3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan subsektor kebakaran 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai sumber daya manusia yang handal dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman 5. Pengelolaan perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pengadministrasi

	keterampilan dalam menangani kebakaran secara mandiri 6. Masih ada kawasan di luar jangkauan ideal pelayanan pos yang tersedia 7. Belum meratanya jaringan infrastruktur penunjang pemadam kebakaran di wilayah					an barang milik daerah yang akuntabel

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-City).

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Sedangkan sasaran stratejik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun dan dialokasikan dalam empat periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Yogyakarta yaitu ***Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran.***

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Terdapat dua (2) sasaran stratejik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis Damkarmat Kota Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	Target tahunan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan	71,85	76, 14	80, 43	84, 72	89, 02	93,31
2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahunan				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan	71,85	76,14	80,43	84,72	89,02	93,31
			Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Damkarmat Kota Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	Target tahunan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan	71,85	76,14	80,43	84,72	89,02	93,31
2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 3.4. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Program Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran	1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 perlu disusun dalam beberapa pentahapan sebagai kerangka waktu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Setiap tahapan menggambarkan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah dalam memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Selaras dengan RPJMD Kota Yogyakarta, tahapan pembangunan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terbagi dalam 5 (lima) tahapan.

Tabel 3.5. Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025 dan 2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut.

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses,

memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi

menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

3.5. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan			
1	Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran			
	Sasaran			
1.1	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan kualitas prasarana umum wilayah, melalui: - Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu Peningkatan ketahanan daerah terhadap keselamatan dan risiko kebakaran, melalui: - Meningkatkan pencegahan terhadap risiko kebakaran - Meningkatkan penanggulangan	- Melaksanakan pengendalian bangunan gedung melalui penerbitan rekomendasi teknis dan inspeksi proteksi kebakaran bangunan gedung - Membangun jaringan hidran kering kampung sesuai DED dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem jaringan hidran kering kampung dan bak tandon - Melaksanakan penanggulangan kebakaran sesuai dengan *response time*	

		kebakaran - Meningkatkan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia - Meningkatkan layanan penunjang keselamatan dan risiko kebakaran - Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	(15 menit) - Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan - Melakukan analisis kebakaran, identifikasi risiko kebakaran, dan investigasi kejadian kebakaran - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pemadaman kebakaran dan penyelamatan - Melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kebakaran kepada masyarakat - Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, melalui: - Mewujudkan kepatuhan perangkat daerah terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan - Meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan dan aset daerah - Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah - Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah - Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah - Meningkatkan responsivitas perangkat daerah - Meningkatkan manajemen risiko dan pencegahan korupsi perangkat daerah	- Melakukan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan - Melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan, pengadministrasian barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah; layanan pengadministrasian umum; peningkatan kualitas kinerja pegawai; peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja - Melakukan kegiatan yang menunjang kualitas SPIP, SAKIP, Zona Integritas, Manajemen Risiko, dan Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program yang diakomodir dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 - 2029 berjumlah 2 (dua) Program. Dari 2 (dua) Program tersebut diperinci menjadi 11 (sebelas) Kegiatan. Dari 11 (sebelas) Kegiatan diperinci menjadi 45 (empat puluh lima) Sub. Kegiatan Adapun perincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

4.1 Uraian Program

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh program program berikut ini:

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat supporting atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yang diampu oleh sekretariat yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.2 Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran di tingkat kabupaten/kota adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengurangi risiko kebakaran, mengatasi kebakaran yang terjadi, menyelamatkan korban, dan menangani risiko B3 saat kebakaran. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga kegiatan teknis seperti inspeksi dan investigasi kebakaran terdiri dari 5 kegiatan yang diampu oleh 2 bidang. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terwujudnya keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman kebakaran, minimnya dampak kerusakan lingkungan akibat B3, serta meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas respon darurat di masyarakat dan instansi terkait	Terpenuhinya keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman kebakaran, minimnya dampak kerusakan lingkungan akibat B3, serta meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas respon darurat di masyarakat dan instansi terkait	Persentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Tterwujudnya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO.	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NO.	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran	1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
				2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan

kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan. Adapun terkait dengan pagu anggaran program keistimewaan, bersifat indikatif bergantung pada kemampuan alokasi transfer keuangan pusat, penilaian kelayakan pusat dan DIY.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahap awal dalam penyusunan program pembangunan daerah dimulai dengan evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup identifikasi permasalahan di seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perencanaan program tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga harus memastikan kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk tahun 2030, menjadi landasan bagi penyusunan RKPD 2030 yang akan diterapkan oleh kepala daerah periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik.

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						15.780.025.794		16.009.993.524		16.509.625.399		16.958.532.705		17.542.584.568	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						9.317.142.444		9.506.653.111		9.747.921.652		10.012.978.233		10.357.825.201	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Damkarmat (Nilai)	A	A		A	9.317.142.444	A	9.506.653.111	A	9.747.921.652	A	10.012.978.233	A	10.357.825.201	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
															Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SPIP Damkarmat (Nilai)	4,245	4,246		4,247		4,248		4,249		4,25		4,251		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai IKM Damkarmat (Nilai)	B	B		B		B		B		B		B		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindun

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
															gan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						6.462.883.350		6.503.340.413		6.761.703.747		6.945.554.472		7.184.759.367	
Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran	Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran (Persentase)	0	40,36		51,08	3.175.720.750	61,81	3.240.315.909	72,54	3.322.554.100	83,27	3.412.894.348	90,74	3.530.434.428	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR (Persentase)	100	100		100	713.014.600	100	636.517.315	100	745.981.705	100	766.264.946	100	792.655.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya penanggulangan kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100	100		100	2.574.148.000	100	2.626.507.189	100	2.693.167.942	100	2.766.395.178	100	2.861.669.828	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindun

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)														gan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN						15.780.025.794		16.009.993.524		16.509.625.399		16.958.532.705		17.542.584.568	

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program- prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025 - 2029 untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mengacu pada program strategis ke 8 (delapan) yaitu ***'Jogja Tangguh Bencana"***

Program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan program yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ygyakarta. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Strategis Walikota

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
Visi : Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban Misi : Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Jogja Tangguh Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.780.025.794		16.009.993.524		16.509.625.399		16.958.532.705		17.542.584.568		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.317.142.444		9.506.653.111		9.747.921.652		10.012.978.233		10.357.825.201		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SPIP Damkarmat (Nilai)	4,245	4,247	9.317.142.444	4,248	9.506.653.111	4,249	9.747.921.652	4,25	10.012.978.233	4,251	10.357.825.201	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
													Penyelamatan	
	Nilai IKM Damkarmat (Nilai)	B	B		B		B		B		B			
	Nilai SAKIP Damkarmat (Nilai)	A	A		A		A		A		A			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.480.000		17.835.541		18.287.907		18.785.462		19.432.433		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	17.480.000	1	17.835.541	1	18.287.907	1	18.785.462	1	19.432.433		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4	4		4		4		4		4			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1		1		1		1		1			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	SKPD (Dokumen)													
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.840.000		1.877.425		1.925.074		1.977.417		2.045.519		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.840.000	2	1.877.425	2	1.925.074	2	1.977.417	2	2.045.519		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.300.000		2.346.782		2.406.343		2.471.771		2.556.899		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	3	3	2.300.000	3	2.346.782	3	2.406.343	3	2.471.771	3	2.556.899		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.380.000		1.408.069		1.443.806		1.483.063		1.534.139		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.380.000	1	1.408.069	1	1.443.806	1	1.483.063	1	1.534.139		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan				1.380.000		1.408.069		1.443.806		1.483.063		1.534.139		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.380.000	1	1.408.069	1	1.443.806	1	1.483.063	1	1.534.139		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.300.000		2.346.782		2.406.343		2.471.771		2.556.899		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	2.300.000	1	2.346.782	1	2.406.343	1	2.471.771	1	2.556.899		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	SKPD (Dokumen)													
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.060.000		5.162.920		5.293.655		5.437.897		5.625.179		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	5.060.000	4	5.162.920	4	5.293.655	4	5.437.897	4	5.625.179		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.220.000		3.285.494		3.368.880		3.460.480		3.579.659		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.220.000	1	3.285.494	1	3.368.880	1	3.460.480	1	3.579.659		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.199.829.188		8.366.613.711		8.578.958.367		8.812.220.244		9.115.713.109		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	8.199.829.188	1	8.366.613.711	1	8.578.958.367	1	8.812.220.244	1	9.115.713.109		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	69		69		69		69		69			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.187.294.188		8.353.823.751		8.565.843.798		8.798.749.091		9.101.778.010		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	69	8.187.294.188	69	8.353.823.751	69	8.565.843.798	69	8.798.749.091	69	9.101.778.010		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.220.000		3.285.494		3.368.880		3.460.480		3.579.659		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	3.220.000	12	3.285.494	12	3.368.880	12	3.460.480	12	3.579.659		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.450.000		3.520.173		3.609.514		3.707.657		3.835.349		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	10	10	3.450.000	10	3.520.173	10	3.609.514	10	3.707.657	10	3.835.349		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				690.000		704.035		721.903		741.531		767.069		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	1	690.000	1	704.035	1	721.903	1	741.531	1	767.069		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD (Laporan)													
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.380.000		1.408.069		1.443.806		1.483.063		1.534.139		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1.380.000	1	1.408.069	1	1.443.806	1	1.483.063	1	1.534.139		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				3.105.000		3.168.155		3.248.563		3.336.891		3.451.814		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11	3.105.000	11	3.168.155	11	3.248.563	11	3.336.891	11	3.451.814		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				690.000		704.034		721.903		741.531		767.069		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	690.000	1	704.034	1	721.903	1	741.531	1	767.069		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				13.927.000		14.210.273		14.560.919		14.967.114		15.482.580		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	13.927.000	2	14.210.273	2	14.560.919	2	14.967.114	2	15.482.580		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	2	2		2		2		2		2			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Daerah SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.840.000		1.877.425		1.925.074		1.977.417		2.045.519		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.840.000	2	1.877.425	2	1.925.074	2	1.977.417	2	2.045.519		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.577.000		2.629.416		2.696.150		2.769.459		2.864.839		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2.577.000	2	2.629.416	2	2.696.150	2	2.769.459	2	2.864.839		
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi				1.380.000		1.408.069		1.443.806		1.483.063		1.534.139		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	1.380.000	2	1.408.069	2	1.443.806	2	1.483.063	2	1.534.139		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.140.000		4.224.207		4.331.417		4.449.189		4.602.419		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.140.000	12	4.224.207	12	4.331.417	12	4.449.189	12	4.602.419		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				880.000		897.899		920.678		945.721		978.292		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	880.000	2	897.899	2	920.678	2	945.721	2	978.292		
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3.110.000		3.173.257		3.243.794		3.342.265		3.457.372		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	3.110.000	2	3.173.257	2	3.243.794	2	3.342.265	2	3.457.372		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				4.100.000		4.183.394		4.289.568		4.406.201		4.557.951		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perangkat Daerah														
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	4.100.000	3	4.183.394	3	4.289.568	3	4.406.201	3	4.557.951		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.100.000		4.183.394		4.289.568		4.406.201		4.557.951		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	4.100.000	3	4.183.394	3	4.289.568	3	4.406.201	3	4.557.951		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.209.100		218.566.112		224.113.319		230.206.961		238.135.289		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	214.209.100	2	218.566.112	2	224.113.319	2	230.206.961	2	238.135.289		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1		1		1		1		1			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Paket)													
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.912.400		7.052.998		7.232.003		7.428.641		7.684.484		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.912.400	1	7.052.998	1	7.232.003	1	7.428.641	1	7.684.484		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				44.816.700		45.728.271		46.888.855		48.163.763		49.822.523		
Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	2	2	44.816.700	2	45.728.271	2	46.888.855	2	48.163.763	2	49.822.523		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)													
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.080.000		4.162.987		4.268.643		4.384.708		4.535.717		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	4.080.000	5	4.162.987	5	4.268.643	5	4.384.708	5	4.535.717		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				158.400.000		161.621.856		165.723.818		170.229.849		176.092.565		
Terlaksananya Penyelenggaraa	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	5	5	158.400.000	5	161.621.856	5	165.723.818	5	170.229.849	5	176.092.565		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				388.564.056		396.467.448		406.529.791		417.583.336		431.964.905		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10	388.564.056	10	396.467.448	10	406.529.791	10	417.583.336	10	431.964.905		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4	4		4		4		4		4			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Surat Menyurat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.040.680		2.092.472		2.149.366		2.223.390		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.000.000	4	2.040.680	4	2.092.472	4	2.149.366	4	2.223.390		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.000.000		9.183.060		9.416.126		9.672.150		10.005.259		
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12	9.000.000	12	9.183.060	12	9.416.126	12	9.672.150	12	10.005.259		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				138.764.056		141.586.516		145.179.982		149.127.426		154.263.374		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10	138.764.056	10	141.586.516	10	145.179.982	10	149.127.426	10	154.263.374		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				238.800.000		243.657.192		249.841.211		256.634.394		265.472.882		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	238.800.000	4	243.657.192	4	249.841.211	4	256.634.394	4	265.472.882		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				479.033.100		488.776.632		501.181.781		514.808.915		532.538.934		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	479.033.100	2	488.776.632	2	501.181.781	2	514.808.915	2	532.538.934		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	33		33		33		33		33			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.591.850		27.132.728		27.821.356		28.577.819		29.562.039		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.591.850	1	27.132.728	1	27.821.356	1	28.577.819	1	29.562.039		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				168.901.250		172.336.701		176.710.606		181.515.368		187.766.757		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	33	33	168.901.250	33	172.336.701	33	176.710.606	33	181.515.368	33	187.766.757		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				83.540.000		85.239.203		87.402.574		89.779.050		92.871.041		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	83.540.000	5	85.239.203	5	87.402.574	5	89.779.050	5	92.871.041		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		204.068.000		209.247.245		214.936.678		222.339.097		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	2	200.000.000	2	204.068.000	2	209.247.245	2	214.936.678	2	222.339.097		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.462.883.350		6.503.340.413		6.761.703.747		6.945.554.472		7.184.759.367		
Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran	Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran (Persentase)	0	51,08	3.175.720.750	61,81	3.240.315.909	72,54	3.322.554.100	83,27	3.412.894.348	90,74	3.530.434.428	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,				4.866.691.600		4.874.681.125		5.091.710.112		5.230.153.710		5.410.280.204		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya kampung yang sudah dibangun hidran kering sesuai DED	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	2.242.550.000	1	2.288.163.467	1	2.346.237.055	1	2.410.031.241	1	2.493.032.717		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.242.550.000		2.288.163.467		2.346.237.055		2.410.031.241		2.493.032.717		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan	1	1	2.242.550.000	1	2.288.163.467	1	2.346.237.055	1	2.410.031.241	1	2.493.032.717		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)													
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				390.507.250		398.450.167		408.562.832		419.671.656		434.125.147		
Terpenuhinya rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	70	70	390.507.250	70	398.450.167	70	408.562.832	70	419.671.656	70	434.125.147		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana				390.507.250		398.450.167		408.562.832		419.671.656		434.125.147		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Proteksi Kebakaran														
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	70	70	390.507.250	70	398.450.167	70	408.562.832	70	419.671.656	70	434.125.147		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.142.289.500		1.165.524.667		1.195.104.658		1.227.599.554		1.269.878.082		
Meningkatnya edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan	2.000	2.000	542.663.500	2.000	553.702.275	2.000	567.754.213	2.000	583.191.451	2.000	603.276.564		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)													
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				542.663.500		553.702.275		567.754.213		583.191.451		603.276.564		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	2.000	2.000	542.663.500	2.000	553.702.275	2.000	567.754.213	2.000	583.191.451	2.000	603.276.564		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat Setiap Tahunnya	Tahunnya (Orang)													
Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR (Persentase)	100	100	713.014.600	100	636.517.315	100	745.981.705	100	766.264.946	100	792.655.111		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				4.866.691.600		4.874.681.125		5.091.710.112		5.230.153.710		5.410.280.204		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota				0		0		0		0		0		
Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	649.619.600	12	571.832.861	12	679.655.560	12	698.135.394	12	722.179.177		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah	4	4		4		4		4		4			

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				178.180.600		181.804.793		186.418.999		191.487.731		198.082.569		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	178.180.600	12	181.804.793	12	186.418.999	12	191.487.731	12	198.082.569		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				154.655.000		157.800.682		161.805.664		166.205.160		171.929.265		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	154.655.000	4	157.800.682	4	161.805.664	4	166.205.160	4	171.929.265		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan				316.784.000		232.227.386		331.430.897		340.442.503		352.167.343		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Aparatur Pemadam Kebakaran														
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	60	60	316.784.000	60	232.227.386	60	331.430.897	60	340.442.503	60	352.167.343		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				28.380.000		28.957.249		29.692.184		30.499.514		31.549.917		
Terpenuhinya pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi	4	4	28.380.000	4	28.957.249	4	29.692.184	4	30.499.514	4	31.549.917		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)													
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				28.380.000		28.957.249		29.692.184		30.499.514		31.549.917		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	4	4	28.380.000	4	28.957.249	4	29.692.184	4	30.499.514	4	31.549.917		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.142.289.500		1.165.524.667		1.195.104.658		1.227.599.554		1.269.878.082		
Terpenuhinya Keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan				0		0		0		0		0		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemadam Kebakaran														
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Keluraha n)			0		0		0		0		0		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraa n Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				35.015. 000		35.727. 205		36.633. 961		37.630. 038		38.926. 017		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	25	25	35.015.000	25	35.727.205	25	36.633.961	25	37.630.038	25	38.926.017		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				35.015.000		35.727.205		36.633.961		37.630.038		38.926.017		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	25	25	35.015.000	25	35.727.205	25	36.633.961	25	37.630.038	25	38.926.017		
Terpenuhinya penanggulangan kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) (Persentase)	100	100	2.574.148.000	100	2.626.507.189	100	2.693.167.942	100	2.766.395.178	100	2.861.669.828		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,				4.866.691.600		4.874.681.125		5.091.710.112		5.230.153.710		5.410.280.204		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya bantuan penanganan kebakaran luar kota				0		0		0		0		0		
Terpenuhinya penanggulangan kebakaran sesuai respontime	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.974.522.000	12	2.014.684.797	12	2.065.817.497	12	2.121.987.075	12	2.195.068.310		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20	20		20		20		20		20			
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.778.108.000		1.814.274.716		1.860.321.009		1.910.903.137		1.976.714.641		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	12	12	1.778.108.000	12	1.814.274.716	12	1.860.321.009	12	1.910.903.137	12	1.976.714.641		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)													
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				196.414.000		200.410.081		205.496.488		211.083.938		218.353.669		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20	20	196.414.000	20	200.410.081	20	205.496.488	20	211.083.938	20	218.353.669		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.142.289.500		1.165.524.667		1.195.104.658		1.227.599.554		1.269.878.082		
Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Keluraha n)	45	45	599.626.000	45	611.822.392	45	627.350.445	45	644.408.103	45	666.601.518		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan				599.626.000		611.822.392		627.350.445		644.408.103		666.601.518		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemadam Kebakaran														
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Keluraha n)	45	45	599.626 .000	45	611.822 .392	45	627.350 .445	45	644.408 .103	45	666.601 .518		

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan secara rinci kegiatan dan subkegiatan yang dirancang untuk secara efektif mendukung program-program prioritas pembangunan daerah dan program-program strategis Wali Kota. Setiap subkegiatan direncanakan untuk dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran program prioritas serta memastikan keterpaduan dan efisiensi dalam implementasi strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Uraian kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam tabel berikut.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA YANG DIDUKUNG	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
1	Jogja Tangguh Bencana	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran	**1.05.04.2.02 - INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN Proteksi Kebakaran**	
				1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				1.05.04.2.04 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	
				1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				1.05.04.2.01 - PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya penanggulangan kebakaran	**1.05.04.2.01 - PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				1.05.04.2.04 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA YANG DIDUKUNG	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)
				1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	**1.05.04.2.01 - PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				1.05.04.2.04 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	
				1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				1.05.04.2.03 - INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN	
				1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				1.05.04.2.05 - PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	
				1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor.

Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rincian IKU, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel berikut.

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan penyelamatan	Nilai	71,85	76,14	80,43	84,72	89,02	93,31	96,30

Indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu Respon Time (15 menit) dalam menangani laporan kebakaran untuk mengurangi kerugian akibat kebakaran hingga pelaksanaan penyelamatan lainnya. Rincian IKK, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Respon Time (15 menit)	persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 adalah dokumen yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan Evaluasi Program Kegiatan, Capaian Program/ Kegiatan/ Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Perangkat Daerah dapat berjalan pada jalur yang telah ditentukan.

Demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala beserta staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh stakeholder.

KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Yogyakarta

(0274) 4298225 bpbd@jogjakota.go.id bpbd.jogjakota.go.id bpbdkotajogja

KATA PENGANTAR

Renstra BPBP Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBP Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Renstra BPBP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis BPBP Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, September 2025
Kepala Pelaksana

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda/Ivc
NIP. 197111191992031004

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kota Yogyakarta 5
2.2. Sumber Daya BPBD Kota Yogyakarta 6
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Yogyakarta 17
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 26
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 32
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 34

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program 40
4.2. Uraian Kegiatan 40
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 42
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 70
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda 71
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 72

BAB V PENUTUP 73
LAMPIRAN vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan 6
Tabel 2.2. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 6
Tabel 2.3. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2024 6
Tabel 2.4. Rekapitulasi PJLOP Tahun 2025 7
Tabel 2.5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD 8
Tabel 2.6. Data Telemetry, EWS Dan CCTV BPBD Kota Yogyakarta 11
Tabel 2.7. Sarana Prasarana Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi 13
Tabel 2.8. Anggaran BPBD Kota Yogyakarta dari Tahun 2021 s/d 2025 17
Tabel 2.9. Target Kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026 18
Tabel 2.10. Realisasi Kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026 20
Tabel 2.11. Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021-2024 21
Tabel 2.12. Indikator Dan Realisasi Kinerja Internal BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 26
Tabel 2.13. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 28
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 33
Tabel 3.2. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Yogyakarta 33
Table 3.3. Nilai per-Indikator IKD Kota Yogyakarta Tahun 2024 Hasil Assesment BNPB 34
Table 3.4. Nilai per-Indikator IKD Kota Yogyakarta Tahun 2024 Hasil Assesment BPBD Kota Yogyakarta 34
Tabel 3.5. Penahapan Renstra PD 37
Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 39
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 43
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 59
Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 70
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 72
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra BPBD Kota Yogyakarta mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra BPBD DIY dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi acuan dalam mengamati pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
(7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
(8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
(9) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
(10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
(11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
(12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
(13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Yogyakarta adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yogyakarta 2025-2029 dari aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kota Yogyakarta adalah:

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 (lima) tahun;
e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
f. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan , dan Isu Strategis Perangkat Daerah Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dan menyajikan kelompok sasaran layanan Bappeda.

Disamping itu pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 termuat bagan struktur organisasi BPBD Kota Yogyakarta sebagaimana dibawah ini:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

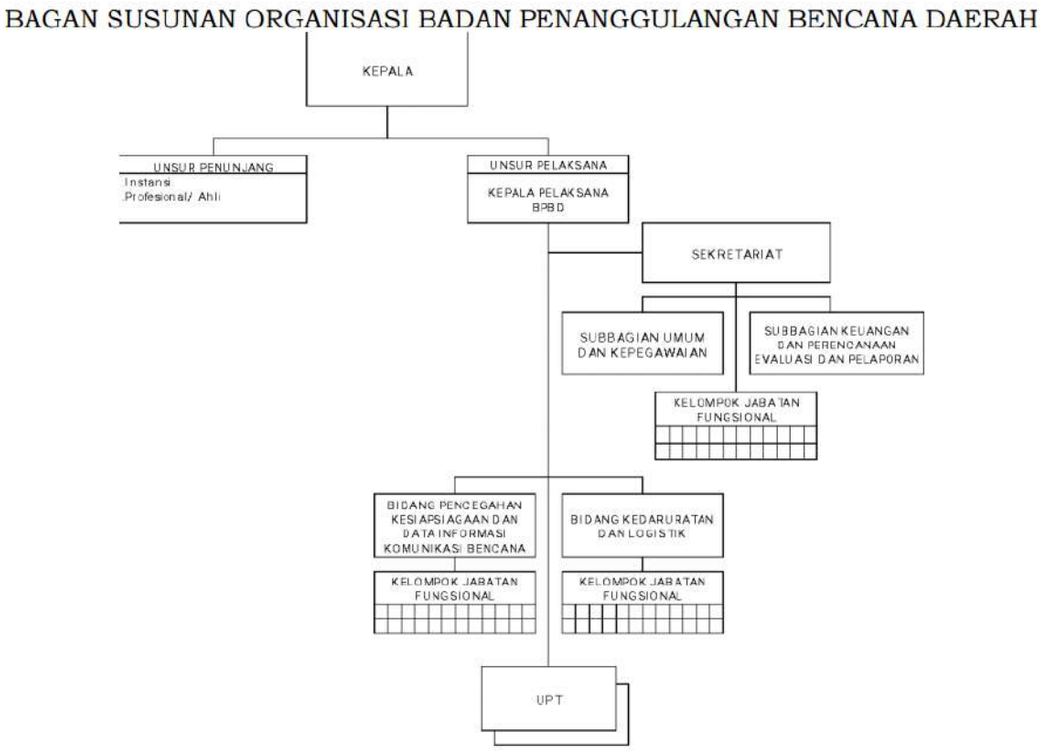

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 menetapkan bahwa BPBD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub-urusan bencana. Penanggulangan bencana (disaster management) meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara menyeluruh;
c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

B.1. Sumber Daya Pegawai

Jumlah personil BPBD Kota Yogyakarta per Desember 2024 adalah 29 (dua puluh sembilan) orang, dengan rincian berdasarkan Jabatan/Golongan dan Tingkat Pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Kategori	Golongan/Ruang									Golongan P3K	
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	VII	IX
1.	Eselon II b									1		
2.	Eselon II a											
3.	Eselon III a								1			
4.	Eselon III b											
5.	Esselon IV a				2			2				
6.	Fungsional Umum	2	7	4	2	1	3					
7.	Fungsional P3K										1	2
	Jumlah	**2**	**7**	**4**	**4**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Tabel 2.2. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Kategori	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		P	L	SMP	SMA	D3	S1/D.IV	S2
1.	Eselon II b		1					1
2.	Eselon II a							
3.	Eselon III a		1					1
4.	Eselon III b		2					2
5.	Esselon IV a	2					1	1
6.	Fungsional Umum	8	12		3	7	8	2
7.	Fungsional P3K	2	1			1	2	
	Jumlah	**12**	**17**		**3**	**8**	**11**	**7**

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Dari perbandingan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dengan Formasi Eksisting ASN di BPBD sejumlah 71 : 29, masih mengalami kekurangan ASN sejumlah 42 personil. GAP antara jumlah personil BPBD berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan Eksisting tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai sesuai Anjab	Pemenuhan Anjab	Deviasi
1	**Kepala**			
2	**Kepala Pelaksana**	**1**	**1**	**-**
3	**Sekretaris**	**1**	**1**	**-**
	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	-
	Perencana Ahli Pertama	1	1	-
	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	1	1	-
4	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**1**	**1**	**-**
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	-
	Pengolah Data dan Informasi	1	1	-
	Pengadministrasi Perkantoran / Arsiparis Terampil	1	-	-1
	Penata Laksana Barang Terampil/Pengolah Data dan Informasi	1	-	-1

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai sesuai Anjab	Pemenuhan Anjab	Deviasi
5	**Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan**	**1**	**1**	**-**
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	-
	Pengolah Data dan Informasi	4	3	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	-1
6	**Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Bencana**	**1**	**1**	**-**
	Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	-2
	Pengolah Data dan Informasi	2	-	-2
	Pengelola Layanan Operasional	2	2	-
	Operator Layanan Operasional	22	1	-21
7	**Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi**	**1**	**1**	**-**
8	**Sub Koordinator Kedaruratan Dan Logistik**	**1**	**1**	**-**
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	-
	Operator Layanan Operasional	10	2	-8
	Pengelola Layanan Operasional	2	1	-1
9	**Sub Koordinator Rehabilitasi Dan Rekonstruksi**	**1**	**1**	
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	-
	Pengolah Data dan Informasi	1	-	-1
	JUMLAH	68	29	-39

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Untuk memenuhi GAP kebutuhan personil untuk operasional Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Yogyakarta juga dibantu oleh 40 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi PJLOP Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah Personil
1	Tenaga Penanganan Bencana Pusdalops PB	13 orang
2	Tenaga Penanganan Bencana TRC PB	16 orang
3	Tenaga Penanganan Bencana Pendamping PB	10 orang
4	Tenaga Penanganan Bencana Sekretariat	1 orang
	Jumlah Total	**40 orang**

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

B.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Gambiran Nomor 26, Pandeyan, Kotagede, Kota Yogyakarta dengan luas bangunan 518 m2. Selain Gedung kantor di Jalan Gambiran, BPBD Kota Yogyakarta juga menggukan Gedung di Tegalturi sebagai tempat mobilitas kendaraan operasional, tower komunikasi dan tempat penyimpanan logistik. Secara umum kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD adalah:

Tabel 2.5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak Ringan
A	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**			
1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Panel Surya) di Gedung BPBD Jalan Tegalturi		1	
B	**Gedung dan Bangunan**			
1	Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	
2	Gedung BPBD		1	
3	Gedung Eks Dinas Sosial Jalan Tegalturi		1	
C	**Peralatan dan Mesin**			
1	ELECTRIC GENERATING SET	2	2	
2	Portable Generating Set	1	1	
3	Pompa Air	5	5	
4	Pick Up	2	2	
5	Sepeda Motor	4	3	1
6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	1	
7	Mobil Jenazah	5	5	
8	Sepeda	1	1	
9	Mesin Kompresor	2	2	
10	Car Washer	2	2	
11	Gergaji Chain Saw	13	13	
12	Dongkrak Hidrolik	2	2	
13	Kunci Pas	1	1	
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	1	
15	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	9	9	
16	Lemari Besi/Metal	6	5	1
17	Lemari Kayu	7	6	1
18	Rak Besi	12	12	
19	Rak Kayu	5	5	
20	Filing Cabinet Besi	12	12	
21	Filing Cabinet Kayu	8	8	
22	Brandkas	1	1	
23	Locker	8	8	
24	Lemari Kaca	2	2	
25	Alat Kantor Lainnya	2	1	1
26	CCTV	5	5	
27	White Board	7	7	
28	Alat Penghancur Kertas	1	1	
29	LCD Projector/Infocus	1	1	
30	Gembok	3	3	
31	Papan Nama Instansi	1	1	
32	Papan Pengumuman	2461	2461	
33	Meubelair	41	41	
34	Meja Kerja Besi/Metal	3	3	
35	Meja Kerja Kayu	42	42	
36	Sice/kursi tamu dan rapat	22	22	
37	Meja Rapat	39	39	
38	Meja Ketik	1	1	
39	Meja Resepsionis	1	1	
40	Meja Panjang	3	3	
41	Meja 1/2 Biro	6	6	
42	Kursi Rapat	74	74	
43	Kursi Putar	10	10	

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak Ringan
44	Kursi Biasa	65	65	
45	Bangku Tunggu	2	2	
46	Kursi Lipat	37	37	
47	Meja Komputer	1	1	
48	Partisi	4	4	
49	Nakas	4	4	
50	Sofa	4	4	
51	Jam Elektronik	3	3	
52	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	
53	Mesin Pel/Poles	22	22	
55	Lemari Es	2	2	
54	A.C. Split	17	17	
55	Kipas Angin	4	4	
56	Exhause Fan	2	2	
57	Kompor Listrik (Alat Dapur)	2	2	
58	Kitchen Set	2	2	
59	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16	16	
60	Televisi	25	24	1
51	Loudspeaker	1	1	
62	Sound System	6	6	
63	Microphone	5	5	
64	Mic Conference	1	1	
65	Stabilisator	10	10	
66	Tangga Aluminium	4	4	
67	Dispenser	7	7	
68	Vertikal Blind	3	3	
69	Gordyin/Kray	3	3	
70	Senter	21	21	
71	Alat Pemadam Kebakaran	560	560	
72	Alat Pemadam/Portable	15	15	
73	Alat Pembantu Kebakaran	38	38	
74	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	
75	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	8	
76	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	
77	Meja Tamu Biasa	2	2	
78	Kursi Kerja Pejabat	15	15	
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6	6	
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	
81	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	4	
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	2	
83	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	8	8	
84	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	
85	Audio Amplifier	2	2	
86	Camera Digital	7	7	
87	GPS Receiver	1	1	
88	Kamera Udara	1	1	
89	Telephone Mobile	3	3	
90	Handy Talky (HT)	129	129	
91	Facsimile	1	1	
92	Alat Komunikasi Radio VHF	2	2	
93	Unit Tranceiver VHF Portable	43	43	
94	Self Supporting Tower	1	1	

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak Ringan
95	Alat Kedokteran Umum	72	72	
96	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8	8	
97	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	1	1	
98	Air Purlier	4	4	
99	P.C Unit	23	23	
100	Note Book	16	16	
101	Mini PC	4	4	
102	Hard Disk	1	1	
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	14	
104	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	4	
105	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
106	External/ Portable Hardisk	4	4	
107	Peralatan Komputer Lainnya	1	1	
108	Uninterupted Power Supply (UPS)	15	15	

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Selain sarana prasana untuk menunjang operasional umum, BPBD juga mengelola sarana prasarana untuk *early warning system* dan kegiatan evakuasi penyelamatan, yaitu:

Tabel 2.6. Data Telemetry, EWS Dan CCTV BPBD Kota Yogyakarta

No	Nama Sungai/Kali	Lokasi		Tempat			Lotitude	Longtitude	Dibangun/Direhap Tahun	Nama KTB (titik lokasi EWS/Telemetry)	Nama KTB (seberang sungai)
		EWS	Telemetry	Kampung	Kelurahan	Kemantren					
I	**SUNGAI BOYONG**										
1	Sungai Boyong	~	Telemetry	Ngentak	Sinduharjo	Ngaglik	7°43´21.67"S	110°23´21.75"E	2022	POS Ngentak	POS Ngentak
II	**SUNGAI CODE**										
1	Sungai Code	~	Telemetry	Terban	Terban	Gondokusuman	7°46´32.23"S	110°22´12.19"E		KTB Terban	
2	Sungai Code	EWS(manual)	~	Cokrokusuman RW 08	Cokrodiningratan	Jetis	7°46´48,7"S	110°22´11,0"E	2013/2022	KTB Cokrokusuman	KTB Terban
3	Sungai Code	EWS(manual)	~	Cokrokusuman RW 11	Cokrodiningratan	Jetis			2023	KTB Cokrokusuman	KTB Terban
4	Sungai Code	EWS(Automatic)	~	Ledok Tukangan RT 10 RW 02	Tegalpanggung	Danurejan	7°47´34,4"S	110°22´07,8"E	2025	KTB Ledok Tukangan	
5	Sungai Code	EWS(manual)	~	Jogoyudan	Gowongan	Jetis	7°47´10,37´S	110°22´2,35"E	2013/2022/2023/2024	KTB Jogoyudan	KTB Kotabaru GK
6	Sungai Code	EWS(manual)	~	Ledok Macanan	Suryatmajan	Danurejan	7°47´27,58"S	110°22´50,4"E	2013/2022	KTB Ledok Macanan	KTB Ledok Tukangan
7	Sungai Code	EWS(manual)	~	Juminahan	Purwokinanti	Pakualaman	7°47´47,81"S	110°22´12,88"E	2013/2022	KTB Juminahan	KTB Cokrodirjan
8	Sungai Code	EWS(Automatic)	~	Jagalan Beji RT 09 RW 02	Purwokinanti	Pakualaman	7°47´59,1"S	110°22´15,8"E	2025	KTB Jagalan Beji	
9	Sungai Code	EWS(manual)	~	Bintaran	Wirogunan	Mergangsan	7°48´13,8"S	110°22´19,3"E	2016/2022	KTB Bintaran	KTB Sayidan
10	Sungai Code	EWS(manual)	~	Surokarsan	Wirogunan	Mergangsan	7°48´18,47"S	110°22´27,79"E	2013/2022	KTB Surokarsan	KTB Prawirodirjan
11	Sungai Code	EWS(manual)	~	Keparakan	Keparakan	Mergangsan	7°48´31,87"S	110°22´26,37"E	2013/2022	KTB Keparakan Lor	KTB Mergangsan Lor
12	Sungai Code	EWS(Automatic)	~	Plumpungrejo RT 65 RW 16	Sorosutan	Umbulharjo	7°49´22,5"S	110°22´32,3"E	2025	KTB Sorosutan	
III	**SUNGAI GAJAH WONG**										
1	Sungai Gajah Wong	~	Telemetry	Gendeng	Baciro	Gondokusuman	7°47´18.9"S	110°23´49.4"E	2023		
2	Sungai Gajah Wong	EWS(manual)	~	Warungboto	Warungboto	Umbulharjo	7°48´41,22"S	110°23´39,73"E	2014/2022/2024	KTB Warungboto	KTB Rejowinangun
3	Sungai Gajah Wong	EWS(Automatic)	~	Gendeng	Baciro	Gondokusuman	7°47,25,5"S	110°23´48,7"E	2025	KTB Gendeng	
4	Sungai Gajah Wong	EWS(Automatic)	~	Balirejo	Muja-Muju	Umbulharjo	7°47,59,1"S	110°23´53,6"E	2025	KTB Balirejo	
5	Sungai Gajah Wong	EWS(manual)	~	Gambiran RW 08	Pandeyan	Umbulharjo	7°48´55,0"S	110°23´31,8"E	2014/2023/2024	KTB Gambiran	KTB Sambirejo KG
6	Sungai Gajah Wong	EWS(manual)	~	Gambiran	Pandeyan	Umbulharjo	7°49´15,49"S	110°23´38,30"E	2014/2023/2024	KTB Gambiran	KTB Darakan

No	Nama Sungai/Kali	Lokasi		Tempat			Lotitude	Longtitude	Dibangun/Direhap Tahun	Nama KTB (titik lokasi EWS/Telemetry)	Nama KTB (seberang sungai)
		EWS	Telemetry	Kampung	Kelurahan	Kemantren					
7	Sungai Gajah Wong	EWS(manual)	~	Darakan Barat	Prenggan	Kota Gede	7°49´33,7"E	110°23´37,2"E	2016/2022	KTB Prenggan	KTB Tegal Gendu KG
8	Sungai Gajah Wong	EWS(manual)	~	Ponggalan	Giwangan	Umbulharjo	7°49´42,32"E	110°22´12,88"E	2016/2003	KTB Ponggalan	Bantul
9	Sungai Gajah Wong	EWS(Automatic)	~	Tegalgendu	Prenggan	Kota Gede	7°49´40,9"E	110°23´37,3"E	2025	KTB Tegalgendu	
IV	**SUNGAI WINONGO**										
1	Sungai Winongo	~	Telemetry	Bener	Bener	Tegalrejo	7°46´36.3"S	110°21´21.0"E	2022		
2	Sungai Winongo	EWS(manual)	~	Pingit	Bumijo	Jetis	7°46´54,6"S	110°21´27,4"E	2016/2022	KTB Pingit	KTB Bener
3	Sungai Winongo	EWS(manual)	~	Serangan	Notoprajan	Ngampilan	7°48´11,5"S	110°21´15,8"E	2016/2023	KTB Serangan	KTB Wirobrajan
4	Sungai Winongo	EWS(Automatic)	~	Serangan	Notoprajan	Ngampilan	7°48´07,1"S	110°21´15,9"E	2025	KTB Serangan	
5	Sungai Winongo	EWS(manual)	~	Notoyudan	Pringgokusuman	Gedongtengen			2018/2023	KTB Notoyudan	KTB Sudagara
6	Sungai Winongo	EWS(manual)	~	Ketangungan	Wirobrajan	Wirobrajan			2014/2018/2023	KTB Ketanggungan	KTB Serangan
7	Sungai Winongo	EWS(Automatic)	~	Gampingan	Pakuncen	Wirobrajan	7°47´54,5"S	110°21´17,5"E	2025	KTB Gampingan	
8	Sungai Winongo	EWS(Automatic)	~	Suryowijayan	Gedongkiwo	Mantrijeron	7°48´31,5"S	110°21´12,9"E	2025	KTB Suryowijayan	
V	**KALI BELIK**										
1	Kali Belik	~	Telemetry	Santikara	Sleman	Sleman	7°46´38.47"S	110°22´49.26"E	2024		
2	Kali Belik	EWS(Automatic)	~	Purbonegaran	Klitren	Gondokusuman	7°46´53.68"S	110°22´50.74"E	2023	KTB Purbonegaran	Sleman
3	Kali Belik	EWS(Automatic)	~	Klitren Lor	Klitren	Gondokusuman	7°47´3.858"S	110°22´52.72"E	2023	KTB Danukusuman	Embung Lagengsari
4	Kali Belik	EWS(Automatic)	~	Pengok Kidul	Bachiro	Gondokusuman	7°47´27.98"S	110°22´48.85"E	2023	KTB Pengok kidul	
5	Kali Belik(Bendung)	CCTV	~		Pandeyan	Umbulharjo	7°49´22.3"S	110°23´09.9"E	2024		
VI	**KALI BUNTUNG**										
1	Kali Buntung	~	Telemetry				7°46´8.213"S	110°21´51.19"E	2024	Karangwaru Lor	KTB Karangwaru Lor
2	Kali Buntung	EWS(Automatic)	~	Karangwaru Lor	Karangwaru	Tegalrejo	7°46´8.432"S	110°21´51.39"E	2024	Karangwaru Lor	KTB Karangwaru Lor
3	Kali Buntung	EWS(Automatic)	~	Blunyah Rejo	Karangwaru	Tegalrejo	7°46´22.51"S	110°21´53.76"E	2024	Blunyah Rejo	KTB Karangwaru Lor
4	Kali Buntung	EWS(Automatic)	~	Kricak Kidul	Karangwaru	Tegalrejo	7°46´43.87"S	110°21´36.90"E	2024	Kricak Kidul	KTB Kricak Kidul
VII	**KALI TEKIK**										
1	Kali Tekik	~	Telemetry						2024		

No	Nama Sungai/Kali	Lokasi		Tempat			Lotitude	Longtitude	Dibangun/Direhap Tahun	Nama KTB (titik lokasi EWS/Telemetry)	Nama KTB (seberang sungai)
		EWS	Telemetry	Kampung	Kelurahan	Kemantren					
2	Kali Tekik	EWS(Automaticl)	~	Bendung Bendosirah		Umbulharjo	7°49´22.3"S	110°23´09.9"E	2025		
3	Kali Tekik	EWS(Automatic)	~	Sidikan	Pandeyan	Umbulharjo	7°49´05.0"S	110°23´10.9"E	2025	KTB Sidikan	
4	Kali Tekik	EWS(Automatic)	~	Ngaglik RT 34 RW 12	Giwangan	Umbulharjo	7°49´57.1"S	110°23´13.6"E	2025		
VIII	**KALI WIDURI**										
1	Kali Widuri	~	Telemetry		Bener	Tegalrejo	7°47'03.7"S	110°21'01.3"E	2025		

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Tabel 2.7. Sarana Prasarana Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi

NO	FUNGSI BARANG	NAMA BARANG	ASAL BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN	SUMBER ENERGI BARANG	KETERANGAN	JUMLAH TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Alat Angkut	Mobil Rescue	BNPB	Ford/Ranger	2014	Besi	BBM/PertaminaDex	Kondisi Rusak	1
		Motor Trail	BNPB	Kawasaki/KLX 150	2014	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Baik	2
		Truk Serbaguna	BNPB	Isuzu/	2015	Besi	BBM/PertaminaDex	Kondisi Baik	1
		Motor Trail	BNPB	Kawasaki/KLX 150	2015	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Baik	2
		Mobil Box	APBD	Mitsubishi/L300	2015	Besi	BBM/PertaminaDex	Kondisi Baik	1
		Mobil Pick Up	BNPB	Mitsubishi/L300	2019	Besi	BBM/PertaminaDex	Kondisi Baik	1
		Mobil Rescue	APBD	Toyota/Hilux	2020	Besi	BBM/PertaminaDex	Kondisi Baik	1
		Mobil Ambulance Jenazah	APBD	Suzuki/APV	2013	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Rusak	1
		Mobil Ambulance Jenazah	APBD	Suzuki/APV	2012	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Baik	5
2	Alat Pendukung	WTP	BNPB		2012	Besi	Listrik	Kondisi Baik	1
		Solar Cell	BNPB		2012	Besi		Kondisi Rusak	5
		Solar Handle Lamp	BNPB		2012	Besi		Kondisi Rusak	8
		Velbed	BNPB		2012	Besi/Kain		Kondisi Rusak	24
		Senter Rescue HID Search Light	BNPB	Polarion	2012	Plastik	Baterai	Kondisi Rusak	5
		Genset 1,2 KVA	BNPB		2013	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Baik	2

NO	FUNGSI BARANG	NAMA BARANG	ASAL BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN	SUMBER ENERGI BARANG	KETERANGAN	JUMLAH TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Genset 5,5 KVA	BNPB		2013	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Rusak	1
		Chainsaw	BNPB	Stihl	2013	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	1
		Perahu Karet	BNPB	Silinger	2014	Karet		Kondisi Baik	1
		Mesin Perahu Karet Kap 18 PK	BNPB	Tohatsu	2014	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	1
		Perahu Polyethylene	BNPB		2014	Polyethylene		Kondisi Baik	2
		Mesin Perahu Karet Kap 9,8 PK	BNPB	Tohatsu	2014	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	2
		Rotarysaw/K12	BNPB	Power Cutting		Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	1
		Mesin Pompa Apung	BNPB	Honda	2016	Besi	BBM/Pertamax	Kondisi Baik	2
		Perahu Lipat 4,28 m	BNPB	Portabote	2017	Plastik		Kondisi Baik	1
		Perahu Lipat 3,85 m	BNPB	Portabote	2017	Plastik		Kondisi Baik	1
		Sprayer PMK	BNPB		2022	Plastik		Kondisi Baik	3
		Genset 2 KVA	BNPB		2024	Besi		Kondisi Baik	3
		Velbed	BNPB		2024	Besi/Kain		Kondisi Baik	5
		Velbed	BNPB		2024	Besi/Kain		Kondisi Baik	50
		Perahu Karet	BNPB		2024	Karet		Kondisi Baik	1
		Mesin Perahu	BNPB		2024	Besi/Plastik		Kondisi Baik	1
		Pompa Alkon	BNPB		2024	Besi		Kondisi Baik	3
		Chainsaw	BNPB	Multipro	2024	Besi/Plastik		Kondisi Baik	5
		Velbed	BNPB		2025	Besi/Kain		Kondisi Baik	100
		Light Towerr	BNPB		2025	Besi/Kain		Kondisi Baik	1
		Pompa Air Irigasi	APBD			Besi		Kondisi Baik	7

NO	FUNGSI BARANG	NAMA BARANG	ASAL BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN	SUMBER ENERGI BARANG	KETERANGAN	JUMLAH TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Chainsaw	APBD	Stihl		Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	5
		Chainsaw	APBD	Stihl	2022	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	5
		Chainsaw (Teko)	APBD	Stihl	2023	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	1
		Tripod	APBD	Camp	2023	Besi		Kondisi Baik	1
		Chainsaw	APBD	Stihl	2023	Besi/Plastik	BBM/Pertamax/Oli 2 Tak	Kondisi Baik	1
		Trolly	APBD	Krisbow	2023	Besi		Kondisi Baik	1
3	Alat Perlindungan Diri & Medis	Paket Alat Vertical Rescue 1	APBD	Petzl	2018	Besi		Kondisi Baik	1
		Paket Alat Vertical Rescue 2	APBD	Petzl	2019	Besi		Kondisi Baik	1
		Paket Alat Vertical Rescue 3	APBD	Petzl	2019	Besi		Kondisi Baik	1
		Basket Stretcher	APBD		2019	Plastik		Kondisi Baik	1
		Scoop Stretcher	APBD	GEA	2019	Besi		Kondisi Baik	1
		Long Spinal Board	APBD	GEA	2019	Plastik		Kondisi Baik	1
		Wetsuit	APBD	Problue	2023	Kain		Kondisi Baik	12
		Sepatu	APBD	Problue	2023	Kain		Kondisi Baik	12
		Ring Buoy	APBD	Lokal	2023	Plastik		Kondisi Baik	5
		Trowing Bag	APBD	Biawak	2023	Kain		Kondisi Baik	5
		Masker & Snorkel	APBD	Problue	2023	Plastik		Kondisi Baik	12
		Rescue Tube	APBD	Lokal	2023	Kain/Busa		Kondisi Baik	5
		Pelampung	APBD	Lokal	2023	Kain/Busa		Kondisi Baik	20
4	Alat Komunikasi dan Elektronik	Handy Talky	BNPB	Icom/V80	2012	Besi/Plastik	Baterai	Kondisi Rusak	5
		RIG	BNPB	Icom/2200	2012	Besi/Plastik	Listrik	Kondisi Rusak	5
		SSB	BNPB	Icom/M7700PRO	2012	Besi/Plastik	Listrik	Kondisi Baik	3
		RIG	APBD	Icom/2730A	2018	Besi/Plastik	Listrik	Kondisi Baik	5

NO	FUNGSI BARANG	NAMA BARANG	ASAL BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN	SUMBER ENERGI BARANG	KETERANGAN	JUMLAH TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		RIG	APBD	Radion/UHF	2020	Besi/Plastik	Listrik	Kondisi Baik	1
		Handy Talky	APBD	Hyt TC-580	2020	Besi/Plastik	Baterai	Kondisi Baik	12
		Handy Talky	APBD	Yaesu VX 6R	2022	Besi/Plastik	Baterai	Kondisi Baik	10
5	Alat Perlindungan, Shelter, Tenda	Tenda Pengungsi	BNPB		2012	Besi/Kain		Kondisi Baik	2
		Tenda Posko	BNPB		2013	Besi/Kain		Kondisi Baik	1
		Tenda Keluarga	BNPB		2013	Besi/Kain		Kondisi Rusak	7
		Tenda Pengungsi	BNPB		2020	Besi/Kain		Kondisi Baik	2
		Tenda Pengungsi	BNPB		2024	Besi/Kain		Kondisi Baik	2
		Tenda 4x4 m	BNPB		2024	Besi/Kain		Kondisi Baik	50

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana pendukung operasional BPBD, setiap tahun dianggarkan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

B.3. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD saat dipengaruhi oleh: (1) kecukupan PAD dan (2) kejadian bencana. Jumlah anggaran yang dikelola BPBD dari tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat dlaam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8. Anggaran BPBD Kota Yogyakarta dari Tahun 2021 s/d 2025

NO	TAHUN	ANGGARAN			REALISASI	% REALISASI
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/ Jasa/ Modal	Jumlah Anggaran		
1	2021	3.100.043.220	11.235.441.254	14.335.484.474	12.764.294.187	89,04%
2	2022	3.711.676.000	11.027.748.783	14.739.424.783	13.716.792.685	93,06%
3	2023	3.667.227.000	11.034.320.245	14.701.547.245	14.093.199.618	95,86%
4	2024	4.066.258.000	10.063.038.605	14.129.296.605	13.659.823.875	96,68%
5	2025	4.148.526.000	7.307.935.777	11.456.461.777		

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan BPBD Kota Yogyakarta pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan BPBD Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra BPBD pada periode sebelumnya, yaitu mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2026, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Dalam Renstra BPBD Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026, terdapat 1 (satu) kinerja pelayanan startegis yang diampu oleh BPBD, yakni: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerjanya berupa Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Perbedaan indikator kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026 ada pada formula perhitungannya. Secara rinci, perbedaan formula perhitungan indikator kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan indikator kinerja Renstra Tahun 2023-2026 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2.9. Target Kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026

No	Periode Renstra	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target per Tahun									
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tahun 2017-2022	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100	58,50%	61,00%	75,82%	84,02%	88,46%	92,90%	-	-	-	-
		Sumber Data	Persentase kampung tangguh bencana yang terbentuk	40%	40%	67,65%	68,05%	76,92%	85,80%	-	-	-	-
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	75%	82%	84%	100%	100%	100%	-	-	-	-
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	80%	82%	84%	100%	100%	100%	-	-	-	-
2	Tahun 2022-2026	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	(50% kesiapsiagaan penanggulangan bencana + 30 % evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	88,38%	91,03%	91,67%	92,32%

No	Periode Renstra	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target per Tahun									
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tanggap darurat lengkap + 20% penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana) dikali 100										
		Sumber Data	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana (pembentukan KTB, pembentukan SPAB/Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan pemenuhan dokumen data dan informasi bencana terpadu)	-	-	-	-	-	-	76,76%	82,06%	83,35%	84,64%
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Sedangkan realisasi capaian pada periode kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10. Realisasi Kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026

No	Periode Renstra	Indikator Kinerja	Target per Tahun																								
			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025	2026
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	T
1	Tahun 2017-2022	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	58,50 %	56,67 %	96,87 %	61,00 %	73,57 %	120,61 %	75,82 %	83,82 %	110,56 %	84,02 %	84,02 %	100 %	88,46 %	88,46 %	100 %	92,90 %	92,90 %	100 %								
2	Tahun 2022-2026	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana																			88,38 %	88,38 %	100 %	91,03 %	91,03 %	100 %	91,67 %	92,32 %

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

KETERANGAN:

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Dilihat dari tabel diatas, bahwa meskipun ada tantangan dalam mencapai target pada tahun 2017 akibat efisiensi anggaran dalam kegiatan pembentukan KTB (Kampung Tangguh Bencana), namun upaya perbaikan dan penyesuaian yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya (2018 dan 2019) berhasil meningkatkan capaian kinerja Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, sehingga pada akhir tahun Renstra (tahun 2022), capaian indikator kinerja tetap tercapai 100%.

Capaian kinerja yang mencapai 100% pada periode Renstra 2017-2022 ini, dapat dipertahankan dan dilanjutkan pada periode Renstra 2023-2026 yang menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya BPBD, dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dan mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain target kinerja utama atau sasaran startegis yang termuat dalam Renstra dan RPJMD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, BPBD Kota Yogyakarta juga mengampu ketugasan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minila) Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan. Hasil pelaksanaan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta, dilaporkan secara berkala oleh BPBD kepada Kemendagri melalui aplikasi e-SPM, sebagai berikut:

Tabel 2.11. Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	2. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media	318.750 orang	318.750 orang	44.393 orang	44.393 orang	78.092 orang	78.092 orang	120.678 orang	120.678 orang

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	sosial dan wahana multimedia)								
	3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	0	0	388 unit	388 unit	779 unit	779 unit	688 unit	688 unit
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	1.026 unit	1.026 unit	150 unit	150 unit	179 unit	179 unit	295 unit	295 unit
	2. Peningkatan kapasitas	478 orang	478 orang	5.085 orang	5.085 orang	3.622 orang	3.622 orang	3.590 orang	3.590 orang

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)								
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan	45 posko	45 posko	45 posko	45 posko	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	petugas penanganan darurat bencana)								
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1.358 orang	1.358 orang	607 orang	607 orang	91 orang	91 orang	105 orang	105 orang
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	penetapan status KLB kurang dari 24 jam)								
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1.358 orang	1.358 orang	607 orang	607 orang	91 orang	91 orang	105 orang	105 orang

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Secara kuantitas, penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta periode tahun 2021-2024, telah terpenuhi 100%. Meskipun demikian, ada beberapa catatan dari Kemendagri yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan penerapan SPM secara keseluruhan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemenuhan SPM dengan prioritas penduduk miskin dan afirmasi gender;
2. Keselarasan pemenuhan SPM mulai dari dokumen perencanaan hingga penganggaran.

Selain indikator kinerja utama/strategis dan indakator pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan yang terkait dengan penilaian terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat, pada periode Renstra Tahun 2023-2026, ditetapkan juga indikator kinerja untuk mengukur performa/akuntabilitas BPBD sebagai organisasi perangkat daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.12. Indikator Dan Realisasi Kinerja Internal BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program	Tahun					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	BB Nilai
	1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Selama kurun waktu 2 tahun (2023-2024), indikator kinerja internal BPBD Kota Yogyakarta telah mencapai 100%, dengan beberapa catatan/rekomendasi tindak lanjut dari Inspektorat Kota Yogyakarta:

1. Meningkatkan kelengkapan dokumentasi pendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan nilai 8 (delapan) indikator penilaian Reformasi Birokrasi, khususnya pada Penilaian Indeks Pembangunan Statistik; dan
3. Penyempurnaan formula IKU BPBD.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta, kelompok sasaran yang dilayani oleh BPBD Kota Yogyakarta adalah seluruh penduduk Kota Yogyakarta pada tahapan pra, saat dan pasca bencana. Tahapan pra bencana berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, termasuk kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan sistem peringatan dini. Tahapan saat bencana berupa pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban bencana, baik kepada orang/manusia maupun harta bendanya. Dan tahapan pasca bencana berupa pemulihan sarana prasarana/infrastruktur dan penghidupan ekonomi sosial setelah terjadinya bencana.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

Mitra BPBD dalam pemberian pelayanan sesuai dengan crosscutting, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, DPUPKP Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, DIPERTARU Kota Yogyakarta, SATPOL PP Kota Yogyakarta, dan DPMPTS Kota Yogyakarta dalam kegiatan Pengintegrasian Risiko Penanggulangan Bencana dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang berupa: Perlindungan Daerah / Kawasan Tangkapan Air, Penerapan Sumur Resapan dan / atau biopori, Revitalisasi Waduk dan / atau Sungai, Pemantauan Berkala Hulu Sungai, Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi, dan Penegakan Hukum.
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Sekolah Negeri dan SwastaTingkat SMP dan kebawahnya, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, RS/Klinik Swasta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Kemantren/Kelurahan Kota Yogyakarta, dan DPRD Kota Yogyakarta dalam pembentukan dan penguatan program kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), RS Aman Bencana, Kampung Tangguh Bencana (KTB), pembinaan Penanggulangan Bencana Kawasan Pasar dan Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA);

3. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, DIPERTARU Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, BPBD D.I. Yogyakarta, dan BNPB dalam kegiatan pelayanan sistim informasi kebencanaan terpadu;
4. Basarnas, PMI, Damkarmat Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, dan relawan untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi;
5. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, DPUPKP Kota Yogyakarta, BPBD D.I. Yogyakarta dan BNPB untuk pemenuhan logistik dan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
6. Dinas Pariwisata Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, dan Paniradya D.I. Yogyakarta dalam kegiatan mitigasi bencana di kawasan peninggalan budaya, termasuk kawasan sumbu filosofi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Penetapan isu strategis pada BPBD Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemetaan dan identifikasi permasalahan yang digali dari: dokumen Evaluasi Kinerja BPBD Kota Yogyakarta tahun 2021-2024, dokumen Roadmap Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, dokumen Kajian Risiko Bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, dimana hasil pemetaan tersebut diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder yang kolaboratif dalam penanggulangan bencana
2. Lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai
3. Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
4. Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder
5. Belum optimalnya data informasi sistem penanggulangan bencana
6. Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan cuaca ekstrim
7. Lemahnya pemeliharaan aliran air/drainase
8. Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Belum optimalnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di level masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan
10. Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)

Berdasarkan uraian di atas dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan BPBD Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2.13. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah secara menyeluruh	- Belum optimalnya perencanaan, kebijakan dan kelembagaan multi stakeholder yang kolaboratif dalam penanggulangan bencana - Lemahnya penegakan hukum pada daerah sempadan sungai - Masih kurangnya kebijakan dan mekanisme pemulihan dasar, infrastruktur dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana - Belum optimalnya sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana yang melibatkan multi stakeholder - Belum optimalnya data informasi sistem	**Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi.** Kerentanan dan kesenjangan sosial serta ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dengan ancaman bencana. Berikut beberapa aspek penting: Kerentanan Sosial - Faktor demografis seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Contohnya, perempuan, anak-anak, dan lansia lebih rentan karena keterbatasan akses ke sumber daya dan kemampuan untuk mengevakuasi diri. - Kondisi sosial ekonomi juga berperan penting, di	**Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.** Perubahan iklim memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan kota dan penanggulangan bencana. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ektrim, yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan infrastruktur kota. Kaitan Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota: - Perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan kota terhadap bencana, terutama di daerah pesisir dan perkotaan yang padat penduduk.	**Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana.** Kerentanan Sosial-Ekonomi - Merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari bencana atau krisis pangan. - Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan akses ke sumber daya dapat meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi. Dampak terhadap Krisis Pangan - Ketahanan pangan yang lemah dapat meningkatkan risiko krisis pangan, terutama di daerah yang rentan	**Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya.** Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO memiliki implikasi dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut: - Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun peraturan wali kota (Perwal) tentang pedoman teknis pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia untuk mengatur penataan dan pengembangan kawasan. - Perwal ini mencakup penyelesaian tekanan	Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan. Kriteria Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan - Aksesibilitas: Infrastruktur harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. - Keandalan: Infrastruktur harus dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah rusak. - Kelestarian: Infrastruktur harus dirancang dan dikelola untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. - Ketahanan: Infrastruktur harus dirancang untuk tahan terhadap bencana

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	penanggulangan bencana - Lemahnya pemeliharaan aliran air/drainase - Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana (identifikasi sampai pengembangan UMKM dan pariwisata)	mana masyarakat miskin lebih rentan karena tinggal di kawasan rawan bencana dengan infrastruktur minim. Kerentanan Ekonomi - Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan sumber daya untuk menghadapi dan pulih dari bencana. - Kesenjangan ekonomi juga dapat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dampak Kerentanan terhadap Ancaman Bencana - Kerentanan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan risiko bencana dan memperburuk dampaknya.	- Ketahanan kota yang rendah dapat memperburuk dampak bencana dan memperlambat proses pemulihan. - Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan ketahanan kota melalui strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Strategi Penanggulangan Bencana: - Aksi Antisipatif: Melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana sebelum terjadi, seperti identifikasi risiko, perencanaan evakuasi, sistim peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat. - Manajemen Risiko: Mengidentifikasi,	terhadap bencana alam atau perubahan iklim. - Keterbatasan akses ke makanan yang cukup dan terjangkau dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dampak terhadap Risiko Bencana - Kerentanan sosial-ekonomi dapat meningkatkan risiko bencana, terutama jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dan pulih dari bencana. - Bencana dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penting untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan.	pembangunan, lingkungan, penanggulangan bencana alam, dan kesiapsiagaan bencana. - Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia dilaksanakan sesuai batas administratif Kota Yogyakarta, dengan zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan yang telah ditetapkan. **Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta.** Tujuan Pengelolaan SRS - Mengintegrasikan pengelolaan kawasan strategis dengan penanggulangan	dan dapat pulih dengan cepat setelah bencana. Kaitan dengan Penanggulangan Bencana - Infrastruktur yang berkualitas dapat membantu mengurangi risiko bencana dan meminimalkan dampaknya. - Pengelolaan infrastruktur yang efektif dapat membantu meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana. - Perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang tepat dapat membantu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		- Oleh karena itu, penting untuk memahami kerentanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi ancaman bencana. Pengurangan Risiko Bencana - Pendekatan holistik diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk mitigasi ancaman, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan wilayah. - Peningkatan kapasitas masyarakat dan wilayah dapat membantu mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.	menilai, dan mengelola risiko bencana untuk mengurangi dampaknya. - Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif.	Strategi Mengatasi Kerentanan - Meningkatkan Ketahanan Pangan: Dengan meningkatkan akses ke makanan yang cukup dan terjangkau, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi krisis pangan. - Meningkatkan Kapasitas Masyarakat: Dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta meningkatkan akses ke sumber daya dan informasi. - Mengurangi Kerentanan: Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi, seperti	bencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan warisan budaya. - Mengembangkan strategi pengembangan wilayah SRS yang efektif dan berkelanjutan . Program penanggulangan becana memastikan mitigasi risiko bencana terhadap pengembangan dan pembangunan wilayah SRS secara berkelanjutan.	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				kemiskinan dan ketidaksetaraan.		

(Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi dalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

VISI	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
MISI 1	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
MISI 3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
MISI 4	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
MISI 5	Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dengan memperhatikan isu strategis penanggulangan bencana dalam Bab II, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	0,695	0,700	0,705	0,710	0,715	0,720	
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

Tujuan jangka menengah BPBD secara umum adalah “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana”. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif. Secara lebih spesifik, formula masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.2. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	(6% x indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) + (6% x indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu) + (7,5% x indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik) + (10,5% x indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana) + (21% x indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) + (35% x indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana) + (14% x indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana)
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	(6% x indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) + (6% x indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu) + (7,5% x

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
				indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik) + (10,5% x indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana) + (21% x indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) + (35% x indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana) + (14% x indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana)
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat

(Sumber Data: BPBD Kota Yogyakarta)

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada tahun 2024, BPBD telah melaksanakan perhitungan nilai IKD Kota Yogyakarta, baik secara mandiri/selft assesment, maupun berdasarkan hasil assesment BNPB, dengan hasil penilaian IKD per- indiaktor, sebagai berikut:

Table 3.3. Nilai per-Indikator IKD Kota Yogyakarta Tahun 2024 Hasil Assesment BNPB

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,69	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,68		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,68		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45		

(Sumber: Surat BNPB Nomor B-06.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 Tanggal 8 Januari 2025)

Table 3.4. Nilai per-Indikator IKD Kota Yogyakarta Tahun 2024 Hasil Assesment BPBD Kota Yogyakarta

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,99	0,74	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,83		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,88		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,85		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,62		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,51		

(Sumber: Penilaian mandiri IKD BPBD Kota Yogyakarta)

Dalam kedua tabel diatas terlihat perbedaan nilai IKD hasil penilaian mandiri IKD oleh BPBD Kota Yogyakarta dengan nilai IKD hasil penilaian BNPB. Hal ini disebabkan kualitas bukti dukung yang disampaikan oleh BPBD Kota Yogyakarta belum memenuhi nilai maksimal BNPB dimana nilai IKD Kota Yogyakarta yang masih perlu ditingkatkan ada pada:

a. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, dengan indikator/unsur penilaiannya adalah: (1) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah, (2) Pemulihan infrastruktur penting, (3) Perbaikan rumah penduduk, dan (4) Pemulihan Penghidupan masyarakat.
b. Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dengan indikator/unsur penilaiannya adalah: (1) Rencana Kontijensi Gempabumi, (2) Rencana kontijensi banjir, (3) Sistem peringatan dini bencana banjir, (4) Rencana kontijensi erupsi gunungapi, (5) Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi, (6) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi, (7) Rencana kontijensi kekeringan, (8) Sistem peringatan dini bencana kekeringan, (9) Penentuan Status Tanggap Darurat, (10) Penerapan sistem komando operasi darurat, (11) Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana, (12) Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban, (13) Perbaikan Darurat, (14) Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh, dan (15) Penghentian status Tanggap Darurat.
c. Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan indikator/unsur penilaiannya adalah: (1) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori, (2) Perlindungan daerah tangkapan air, (3) Restorasi sungai, (4) Penguatan lereng, (5) Penegakan hukum, (6) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan, (7) Pemantauan berkala hulu sungai, (8) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi, (9) Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota, dan (10) Konservasi vegetatif DAS rawan longsor.
d. Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan indikator/unsur penilaiannya adalah: (1) Penataan ruang berbasis PRB, (2) Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik, (3) Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), (4) RSAB dan Puskesmas Aman Bencana, dan (5) Desa Tangguh Bencana.
e. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, dengan indikator/unsur penilaiannya adalah: (1) Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat, (2) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya, Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha, (3) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis, (4) Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional, (5) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB, (6) Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan, (7) Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, (8) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, (9) Penyimpanan/pergudang Logistik PB, (10) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik, dan (11) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat, Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

Belum optimalnya nilai IKD pada indeks prioritas sejalan dengan isu strategis yang ditetapkan BPBD pada Bab II, yaitu:

- Penyelenggaraan PB kolaboratif belum optimal
- Meningkatnya Risiko bencana seiring penurunan kualitas lingkungan
- Lemahnya perencanaan kedaruratan dan pemulihan
- Lemahnya kualitas partisipasi dan mandiri masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana
- Meningkatnya kerentanan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Pariwisata yang berisiko bencana

Memperhatikan data diatas dan untuk meningkatkan penilaian dalam masing-masing indeks prioritas IKD dalam rangka mencapai tujuan Renstra berupa “meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana”, BPBD Kota Yogyakarta merencanakan beberapa strategi, sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan penanggulangan bencana periode pra bencana, meliputi:
    1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu:

a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:
   a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
   b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
   c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
   d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
   e. penyiapan lokasi evakuasi;
   f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
   g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,
3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:
   a. mengamati gejala bencana;
   b. menganalisis data hasil pengamatan;
   c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
   d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
   e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

B. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
   1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
   2. penentuan status keadaan darurat bencana;
   3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   4. pemenuhan kebutuhan dasar;
   5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
   6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

C. Penyelenggaraan penanggulangan bencana periode pasca bencana, meliputi:
   1. penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana
   2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
   3. pengurangan risiko bencana;
   4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
   5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
   6. penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
   7. pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Sedangkan untuk mencapai target kinerja berupa “Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif”, dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPBD dengan penyediaan kegiatan dan belanja pada:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari perencanaan langkah strategis diatas, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Renstra, ditetapkan langkah strategis yang menjadi prioritas pelaksanaan, sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pencegahan bencana berbasis kajian risiko	Pengembangan jejaring edukasi Pengurangan Rsisiko Bencana (PRB) berbasis sekolah dan komunitas	Integrasi pencegahan bencana dalam RTRW dan dokumen pembangunan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk edukasi dan literasi PRB	Penyempurnaan regulasi terkait mitigasi dan pencegahan bencana	Tata kelola pencegahan adaptif, partisipatif dan berkelanjutan
Peningkatan kapasitas masyrakat melalui penyusunan roadmap pengelolaan Kampung Tangguh Bencana (KTB), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan komunitas/ kawasan tertentu	Pelaksanaan roadmap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Monev pelaksanaan roadmap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Penguatan kerjasama dalam pelaksanaan roadmap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pengembangan dan perluasan jangkauan roadmap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana
Meningkatkan efektifitas, keterbukaan dan universalitas sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan dengan memaksimalkan fungsi *Early Warning System* dan keterlibatan Kampung Tangguh Bencana	Memastikan kesinambungan efektifitas, keterbukaan dan universalitas sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan terpadu melalui kegiatan monev, simulasi terpadu, dan jejaring kerjasama	Peningkatan efektifitas sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang sudah ada berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data	Pelaksanaan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data secara berkelanjutan	Perekaman dan analisis data dan informasi kebencanaan yang handal yang digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak bencana melalui sistem penanggulangan pasca bencana secara lintas sektor	Meningkatkan kapasitas sistem penanggulangan pasca bencana lintas sektor secara cepat dan efisien	Pengembangan strategi dan teknologi inovatif untuk percepatan pemulihan	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM dalam percepatan pemulihan	Mewujudkan sistem pemulihan yang tangguh, cepat, dan berkelanjutan dengan memperhatikan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				faktor kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.	Pengujian dan simulasi untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat bekerja secara efektif dalam penanganan darurat bencana	Mengembangkan prosedur untuk penanganan darurat bencana, termasuk evakuasi, penyelamatan dan bantuan darurat	Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa sumberdaya manusia dapat bekerja secara efektif dalam penanganan darurat bencana	Evaluasi terhadap kinerja sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana dan melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tetap efektif dan handal
Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatanan penanganan darurat bencana.	Pengujian dan simulasi untuk memastikan system peralatan dan logistic penanganan darurat bencana berfungsi dengan baik dan efektif	Meningkatan kapasitas dalam pengelolaan logistic dan peralatan penanganan darurat bencana	Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kesiapsiagaan penyediaan logistic dan peralatan penanganan darurat bencana	Evaluasi terhadap penyediaan logistic dan peralatan penanganan darurat bencana secara berkala dan melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan logistic dan peralatan tetap efektif dan handal

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Renstra BPB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan penegakan standar keandalan infrastruktur yang berketahanan bencana, melalui: a. Meningkatkan efektivitas mitigasi bencana b. Mengembangkan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana d. Meningkatkan kualitas sistem pemulihan bencana e. Meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana	a. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien b. Penguatan Sistem Peringatan Dini Meningkatkan sistem peringatan dini bencana untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. d. Pengembangan Infrastruktur Meningkatkan infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan yang dirancang untuk tahan gempa atau banjir. e. Kerja Sama dengan Stakeholder Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, seperti pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. f. Pengembangan Sistem Informasi Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola data bencana, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif g. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan Tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, BPBD Kota Yogyakarta pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 Uraian program

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD didukung oleh program-program berikut ini:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat supporting atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan yang diampu oleh sekretariat yaitu: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana adalah suatu rencana dan kegiatan yang sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam atau buatan manusia. Tujuan utama program ini adalah untuk melindungi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan dari ancaman bencana, serta meminimalkan kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi. Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kota Yogyakarta diampu oleh Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan dan Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

4.2 Uraian kegiatan

Kegiatan yang mendukung program kerja BPBD Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis BPBD Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Yogyakarta antara lain:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA–SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

(2) Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari 11 sub kegiatan yaitu Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, dan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit, dan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terdiri dari 12 sub kegiatan yaitu Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota, Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota, Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.

4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana				Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB (Nilai)		
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana			Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)		
			Meningkatnya efektivitas mitigasi bencana		Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terpenuhinya kualitas kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Penanganan Darurat bencana		Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)		
				Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Sistem Pemulihan Bencana		Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)		
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Mengembangkan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana		Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dini terpadu multi ancaman	dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan		Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
						1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi BPBD (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPBD		Nilai SAKIP BPBD (Predikat)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM BPBD (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BPBD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masingmasing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													11.666.363.327		8.611.071.745		9.004.253.524		9.293.721.186		9.573.166.618		9.881.310.690		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5.828.984.127		5.407.005.795		5.735.567.024		5.941.507.403		6.129.820.742		6.319.964.814		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPBD										Nilai SAKIP BPBD (Predikat)	A	A	5.828.984.127	A	5.407.005.795	A	5.735.567.024	A	5.941.507.403	A	6.129.820.742	A	6.319.964.814	1.05.0.00.0.00. 03.0000 - BPBD	
										Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	4,24	4,25		4,26		4,27		4,28		4,29		4,3			
										Nilai IKM BPBD (Nilai)	85,94	86		86,3		86,6		86,9		87,2		87,5			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													23.410.000		12.750.000		14.025.000		15.427.500		16.970.250		18.667.275		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	24	7.820.000	1	12.750.000	1	14.025.000	1	15.427.500	1	16.970.250	1	18.667.275		
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral BPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-		16		16		16		16		16			
										Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		1		1		1		1		1			
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
										Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													7.820.000		2.930.000		3.223.000		3.545.300		3.899.830		4.289.813		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7.820.000	4	2.930.000	4	3.223.000	4	3.545.300	4	3.899.830	4	4.289.813		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													5.130.000		2.240.000		2.464.000		2.710.400		2.981.440		3.279.584		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	5.130.000	4	2.240.000	4	2.464.000	4	2.710.400	4	2.981.440	4	3.279.584		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													10.460.000		2.240.000		2.464.000		2.710.400		2.981.440		3.279.584		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	24	10.460.000	1	2.240.000	1	2.464.000	1	2.710.400	1	2.981.440	1	3.279.584		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															2.640.000		2.904.000		3.194.400		3.513.840		3.865.224		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-		16	2.640.000	16	2.904.000	16	3.194.400	16	3.513.840	16	3.865.224		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															2.700.000		2.970.000		3.267.000		3.593.700		3.953.070		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		1	2.700.000	1	2.970.000	1	3.267.000	1	3.593.700	1	3.953.070		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													4.255.522.000		3.863.506.000		3.864.322.000		3.865.219.600		3.866.206.960		3.867.293.056		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	4.255.522.000	12	3.863.506.000		3.864.322.000	12	3.865.219.600	12	3.866.206.960	12	3.867.293.056		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14		14			
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	29		29		29		29		29		29			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													4.247.802.000		3.855.346.000		3.855.346.000		3.855.346.000		3.855.346.000		3.855.346.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	29	4.247.802.000	29	3.855.346.000	29	3.855.346.000	29	3.855.346.000	29	3.855.346.000	29	3.855.346.000		
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													1.600.000		2.040.000		2.244.000		2.468.400		2.715.240		2.986.764		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1.600.000	12	2.040.000		2.244.000	12	2.468.400	12	2.715.240	12	2.986.764		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													6.120.000		6.120.000		6.732.000		7.405.200		8.145.720		8.960.292		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	6.120.000	14	6.120.000	14	6.732.000	14	7.405.200	14	8.145.720	14	8.960.292		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													10.350.000		10.350.000		11.385.000		12.523.500		13.775.850		15.152.835		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	12	10.350.000	12	10.350.000	12	11.385.000	12	12.523.500	12	13.775.850	12	15.152.835		
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	12		12		12		12		12		12			
										Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2		2		2		2		2		2			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													2.300.000		2.300.000		2.530.000		2.783.000		3.061.300		3.367.430		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										Jumlah Rencana Kebutuhan Ban Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.530.000	2	2.783.000	2	3.061.300	2	3.367.430		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													4.600.000		4.600.000		5.060.000		5.566.000		6.122.600		6.734.260		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	12	4.600.000	12	4.600.000	12	5.060.000	12	5.566.000	12	6.122.600	12	6.734.260		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													3.450.000		3.450.000		3.795.000		4.174.500		4.591.950		5.051.145		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	-	12	3.450.000	12	3.450.000	12	3.795.000	12	4.174.500	12	4.591.950	12	5.051.145		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)															
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													1.725.000		1.725.000		1.897.500		2.087.250		2.295.975		2.525.572		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BPBD	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Nilai	88,55	88,85	89,15	89,45	89,75	90,05	90,35	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	1	1.725.000	1	1.725.000	1	1.897.500	1	2.087.250	1	2.295.975	1	2.525.572		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													1.725.000		1.725.000		1.897.500		2.087.250		2.295.975		2.525.572		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	1	1.725.000	1	1.725.000	1	1.897.500	1	2.087.250	1	2.295.975	1	2.525.572		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah													279.655.050		229.944.420		300.201.412		333.221.553		367.543.707		403.298.076		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPBD	Nilai	83,29	83,79	84,29	84,79	85,29	85,79	86,29	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	279.655.050	5	229.944.420	5	300.201.412	5	333.221.553	5	367.543.707	5	403.298.076		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		1		1		1		1		1			
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		1		1		1		1		1			
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		3		3		3		3		3			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													9.165.980		10.352.000		11.387.200		12.525.920		13.778.512		15.156.363		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.165.980	1	10.352.000	1	11.387.200	1	12.525.920	1	13.778.512	1	15.156.363		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													77.847.070		64.410.420		70.851.462		77.936.608		85.730.268		94.303.294		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	3	77.847.070	3	64.410.420	3	70.851.462	3	77.936.608	3	85.730.268	3	94.303.294		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													64.101.000		25.583.500		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	64.101.000	5	25.583.500	5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													41.750.000		41.392.500		45.531.750		50.084.925		55.093.417		60.602.758		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	41.750.000	1	41.392.500	1	45.531.750	1	50.084.925	1	55.093.417	1	60.602.758		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													4.710.000		2.210.000		2.431.000		2.674.100		2.941.510		3.235.661		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	4.710.000	1	2.210.000	1	2.431.000	1	2.674.100	1	2.941.510	1	3.235.661		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													82.081.000		85.996.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	12	82.081.000	2	85.996.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													183.682.500		14.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	15	183.682.500	1	14.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													183.682.500		14.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	15	183.682.500	1	14.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													446.403.000		464.607.375		508.308.112		577.600.000		627.600.000		677.600.000		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	446.403.000	1	464.607.375	1	508.308.112	1	577.600.000	1	627.600.000	1	677.600.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8		7		7		7		7		7			
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		3		3		3		3		3			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat													3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													418.803.000		437.007.375		480.708.112		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	6	418.803.000	7	437.007.375	7	480.708.112	7	550.000.000	7	600.000.000	7	650.000.000		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													628.236.577		810.123.000		835.428.000		935.428.000		1.035.428.000		1.135.428.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	628.236.577	6	810.123.000	6	835.428.000	6	935.428.000	6	1.035.428.000	6	1.135.428.000		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	57				60		60		60		60			
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	22	19		22		22		22		22		22			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)															
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		1		2		2		2		2			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													89.052.000		27.440.000		27.440.000		27.440.000		27.440.000		27.440.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	89.052.000	6	27.440.000	6	27.440.000	6	27.440.000	6	27.440.000	6	27.440.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													313.436.000		368.918.000		368.918.000		368.918.000		368.918.000		368.918.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	19	313.436.000	22	368.918.000	22	368.918.000	22	368.918.000	22	368.918.000	22	368.918.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													58.043.550		39.070.000		39.070.000		39.070.000		39.070.000		39.070.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	57	58.043.550		39.070.000	60	39.070.000	60	39.070.000	60	39.070.000	60	39.070.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													167.705.027		374.695.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	167.705.027	1	374.695.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													5.837.379.200		3.204.065.950		3.268.686.500		3.352.213.783		3.443.345.876		3.561.345.876		
Mengembangkan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana										Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	0,943	0,950	101.711.000	0,957	51.700.000	0,96	60.000.000	0,963	60.000.000	0,997	60.000.000	1	110.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													101.711.000		51.700.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		110.000.000		
Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi BPBD	Nilai	B	B	B	B	A	A	A	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan ditetapkan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-		101.711.000	-	51.700.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	1	110.000.000		
										Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	100	5681		60		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										selama 1 (satu) tahun (Orang)															
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													101.711.000		51.700.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya										Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	100	5681	101.711.000	60	51.700.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota											0	0	0	0	0		0		0		0		50.000.000		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal										Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000		
Meningkatnya efektivitas mitigasi bencana										Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	0,85		3.592.539.550	0,87	1.427.922.000	0,88	1.502.802.000	0,89	1.447.802.000	0,9	1.447.802.000	0,91	1.515.802.000		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													3.592.539.550		1.427.922.000		1.502.802.000		1.447.802.000		1.447.802.000		1.515.802.000		
Terpenuhinya kualitas kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	3.592.539.550	-	1.427.922.000	1	1.502.802.000	-	1.447.802.000	-	1.447.802.000	-	1.515.802.000		
										Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	15	14		15		15		15		15		15			
										Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	-		-		1		-		-		1			
										Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	6	6		6		6		6		6		6			
										Jumlah personil Tim Reaksi Cepat	150	75		75		75		75		75		75			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)															
										Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	8	8		12		12		12		12		12			
										Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	1000		300		500		500		500		500			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													0		0		30.000.000		0		0		68.000.000		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota										Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	-	0	-	0	1	30.000.000	-	0	-	0	1	68.000.000		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													12.146.000		21.625.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana										Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	1000	12.146.000	300	21.625.000	500	30.000.000	500	35.000.000	500	35.000.000	500	35.000.000		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana													645.223.500		390.910.000		390.910.000		390.910.000		390.910.000		390.910.000		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana										Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	15	14	645.223.500	15	390.910.000	15	390.910.000	15	390.910.000	15	390.910.000	15	390.910.000		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													87.178.300		43.495.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana										Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki	150	75	87.178.300	75	43.495.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
										kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)															
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													2.302.589.250		742.082.000		742.082.000		742.082.000		742.082.000		742.082.000		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana										Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	6	6	2.302.589.250	6	742.082.000	6	742.082.000	6	742.082.000	6	742.082.000	6	742.082.000		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													0		0		30.000.000		0		0		0		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal										Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	30.000.000	-	0	-	0	-	0		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													545.402.500		229.810.000		229.810.000		229.810.000		229.810.000		229.810.000		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota										Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	8	8	545.402.500	12	229.810.000	12	229.810.000	12	229.810.000	12	229.810.000	12	229.810.000		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan										Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan (Persentase)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Meningkatnya kualitas Penanganan Darurat bencana										Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	0,62	0,63	1.899.513.650	0,64	1.478.151.450	0,65	1.459.592.000	0,66	1.598.119.283	0,67	1.689.251.376	0,68	1.689.251.376		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													1.899.513.650		1.478.151.450		1.459.592.000		1.598.119.283		1.689.251.376		1.689.251.376		
Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan penyelamatan, evakuasi dan logistik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Menolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100	100	1.899.513.650	100	1.478.151.450	100	1.459.592.000	100	1.598.119.283	100	1.689.251.376	100	1.689.251.376		
										Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100		100		100		100		100		100			
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													947.104.000		1.431.592.000		1.431.592.000		1.551.559.833		1.642.691.926		1.642.691.926		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong,										Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,	100	100	947.104.000	100	1.431.592.000	100	1.431.592.000	100	1.551.559.833	100	1.642.691.926	100	1.642.691.926		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman										Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)															
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													947.104.000		46.559.450		28.000.000		46.559.450		46.559.450		46.559.450		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100	947.104.000	100	46.559.450	100	28.000.000	100	46.559.450	100	46.559.450	100	46.559.450		
Meningkatnya kualitas Sistem Pemulihan Bencana										Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai)	0,51	0,52	243.615.000	0,53	246.292.500	0,54	246.292.500	0,55	246.292.500	0,56	246.292.500	0,57	246.292.500		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													243.615.000		246.292.500		246.292.500		246.292.500		246.292.500		246.292.500		
Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	1	243.615.000	1	246.292.500	1	246.292.500	1	246.292.500	1	246.292.500	1	246.292.500		
										Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	-	1		40		40		40		40		40			
										Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	60		60		60		60		60		60			
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota													19.580.000		30.930.000		30.930.000		30.930.000		30.930.000		30.930.000		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)										Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	60	19.580.000	60	30.930.000	60	30.930.000	60	30.930.000	60	30.930.000	60	30.930.000		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													6.120.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota										Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	-	1	6.120.000	40	13.600.000	40	13.600.000	40	13.600.000	40	13.600.000	40	13.600.000		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota													217.915.000		201.762.500		201.762.500		201.762.500		201.762.500		201.762.500		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal										Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	1	217.915.000	1	201.762.500	1	201.762.500	1	201.762.500	1	201.762.500	1	201.762.500		

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Walikota	Program PD	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan: Jogja Tangguh Bencana				
		1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya efektivitas mitigasi bencana	**1.05.03.2.02 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** 1.05.03.2.02.0006 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.05.03.2.02.0008 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0009 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi 1.05.03.2.02.0010 Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0014 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0016 Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0017 Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota **1.05.03.2.01 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** 1.05.03.2.01.0004 Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Meningkatnya kualitas	**1.05.03.2.03**	

No.	Program Prioritas Walikota	Program PD	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Penanganan Darurat bencana	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** 1.05.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0007 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0009 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Sistem Pemulihan Bencana	**1.05.03.2.04 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** 1.05.03.2.04.0008 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04.0010 Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04.0013 Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.	
			Mengembangkan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana	**1.05.03.2.01 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** 1.05.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan		

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU BPBD Kota Yogyakarta adalah:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
2.	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	Nilai	0,69	0,695	0,7	0,705	0,71	0,715	0,72	
3.	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	Nilai	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kota Yogyakarta adalah:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra BPBD Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra BPBD Kota Yogyakarta periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPBD Kota Yogyakarta.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai penutup, Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BPBD beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas ketahanan penanggulangan bencana daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN I

POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 - 2029

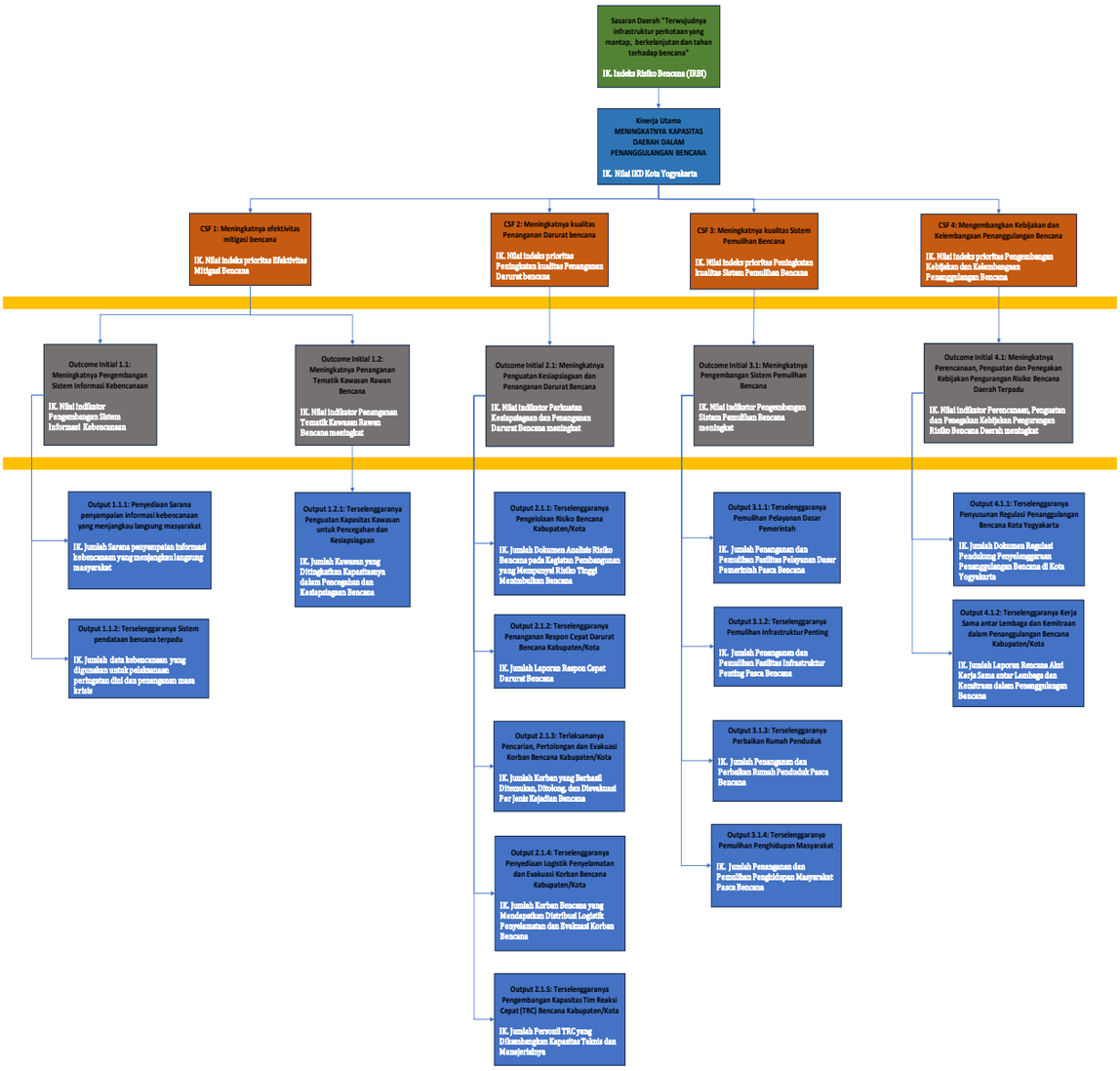

CROSS CUTTING STAKE HOLDERS BPBD KOTA YOGYAKARTA

NO	CROSS CUTTING PROGRAM/ KEGIATAN	STAKE HOLDERS
1	Pengintegrasian Risiko Penanggulangan Bencana dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang berupa: Perlindungan Daerah / Kawasan Tangkapan Air, Penerapan Sumur Resapan dan / atau biopori, Revitalisasi Waduk dan / atau Sungai, Pemantauan Berkala Hulu Sungai, Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi, dan Penegakan Hukum	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, DPUPKP Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, DIPERTARU Kota Yogyakarta, SATPOL PP Kota Yogyakarta, dan DPMPTS Kota Yogyakarta
2	Pembentukan dan penguatan program kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Sekolah Negeri dan SwastaTingkat SMP dan kebawahnya, dan Muhammadiyah Disaster Management Center
	Pembentukan dan penguatan program kegiatan RS Aman Bencana	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan RS/Klinik Swasta
	Pembentukan dan penguatan program kegiatan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Kelurahan	Kemantren/Kelurahan Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta
	Pembinaan Penanggulangan Bencana Kawasan Pasar	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
	Pembinaan Penanggulangan Bencana Kawasan Pariwisata (Hotel, Cagar Budaya, dan Sumbu Filosofi)	Dinas Pariwisata Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, dan Paniradya D.I. Yogyakarta
3	Pemenuhan logistik dan sarana prasarana mitigasi bencana	Dinas Sosial Kota Yogyakarta, DPUPKP Kota Yogyakarta, BPBD D.I. Yogyakarta dan BNPB
4	Kegiatan penyelamatan dan evakuasi	Basarnas, PMI, Damkarmat Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, dan relawan
5	Kegiatan pelayanan sistim informasi kebencanaan terpadu	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, DIPERTARU Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, BPBD D.I. Yogyakarta, dan BNPB

LAMPIRAN II

CASECADING DATA KINERJA BPBD KOTA YOGYAKARTA

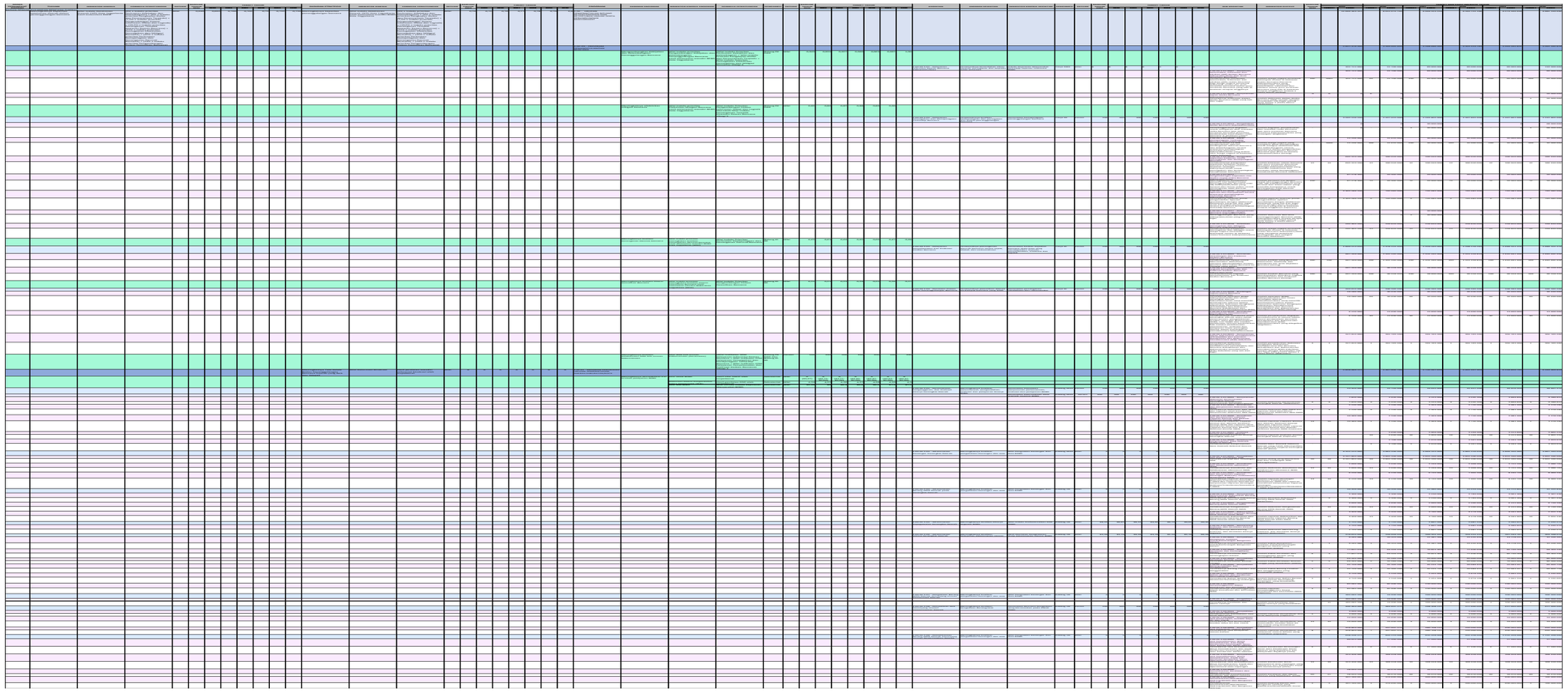

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan karunianya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi di tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang, serta selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini, sehingga saran dan masukan kami perlukan demi peningkatan kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta

Drs. Maryustion Tonang, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606141994031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

Latar Belakang.....
Dasar Hukum Penyusunan
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
1.1. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.2. Maksud dan Tujuan 6

1.3. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....10

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi..... 10

2.1.2. Sumber Daya Dinas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta..... 20

2.1.3. Keadaan Sarana dan Prasarana 22

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

2.1.4.1 Capaian Sasaran Strategi Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Kesejahteraan Sosial.....28

2.1.4.2 Capaian Sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja..... 30

2.1.4.3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja..... 33

2.1.4.4 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi 34

2.1.4.5 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi..... 35

2.1.4.6 Capaian Kinerja Program pada Dinas sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi..... 37

2.1.4.7 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal..... 44

2.1.4.8 Kelompok Sasaran Layanan 46

2.1.4.9 Mitra Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah 47

2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat daerah.....48

2.2.1. Permasalah Perangkat daerah.....48

2.2.2. Isu Strategis Perangkat daerah.....49

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....52

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas sosial tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 52

3.2. Sasaran Rencana Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.....54

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 60

BAB V PENUTUP 143

LAMPIRAN 145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 20

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....21

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....22

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrai 23

Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kerja 25

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....26

Tabel 2.7 data Penganggur Kota Yogyakarta Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia...32

Tabel 2.8 Realisasi Program (Outcome) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....37

Tabel 2.9 Realisasi SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi.....46

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....50

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah54

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....56

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....58

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....60

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 97

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....136

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 138

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 139

Tabel 4.6 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan “Bangga Kencana” sesuai Tugas dan Fungsi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta 140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi 12
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 20
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana di dalam dokumen tersebut menjelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Penyusunan Renstra Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan demikian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada masyarakat secara professional.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur, serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 memperhatikan: (1)

Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakata sampai dengan tahun 2029; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta periode sebelumnya; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029 disusun sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan Rencana kerja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta diawali dengan tahapan persiapan penyusunan rencana strategis dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, penyusunan rencana akhir strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan penetapan rencana strategis perangkat daerah.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Rentra PD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419)
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kota Yogyakarta Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kota Yogyakarta Nomor 47);

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakrta Nomor 51);
25. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 21);
26. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37);
27. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 26)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rentra Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan Rentra Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;

2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kelompok sasaran pelayanan dan mitra yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu- isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan subkegiatan, meliputi kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Lampiran: Pohon Kinerja, Cascading Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah dinas daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dibantu oleh:

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

4. Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
6. Unit Pelayanan Teknis;
7. Jabatan fungsional.

Pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Perlindungan Sosial; dan
   b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial; dan
   c. Rumpun Data dan Informasi Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan
   b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Rumpun Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   b. Rumpun Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari:
   a. Rumpun Pengupahan dan Kesejahteraan;
   b. Rumpun Hubungan Industrial.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

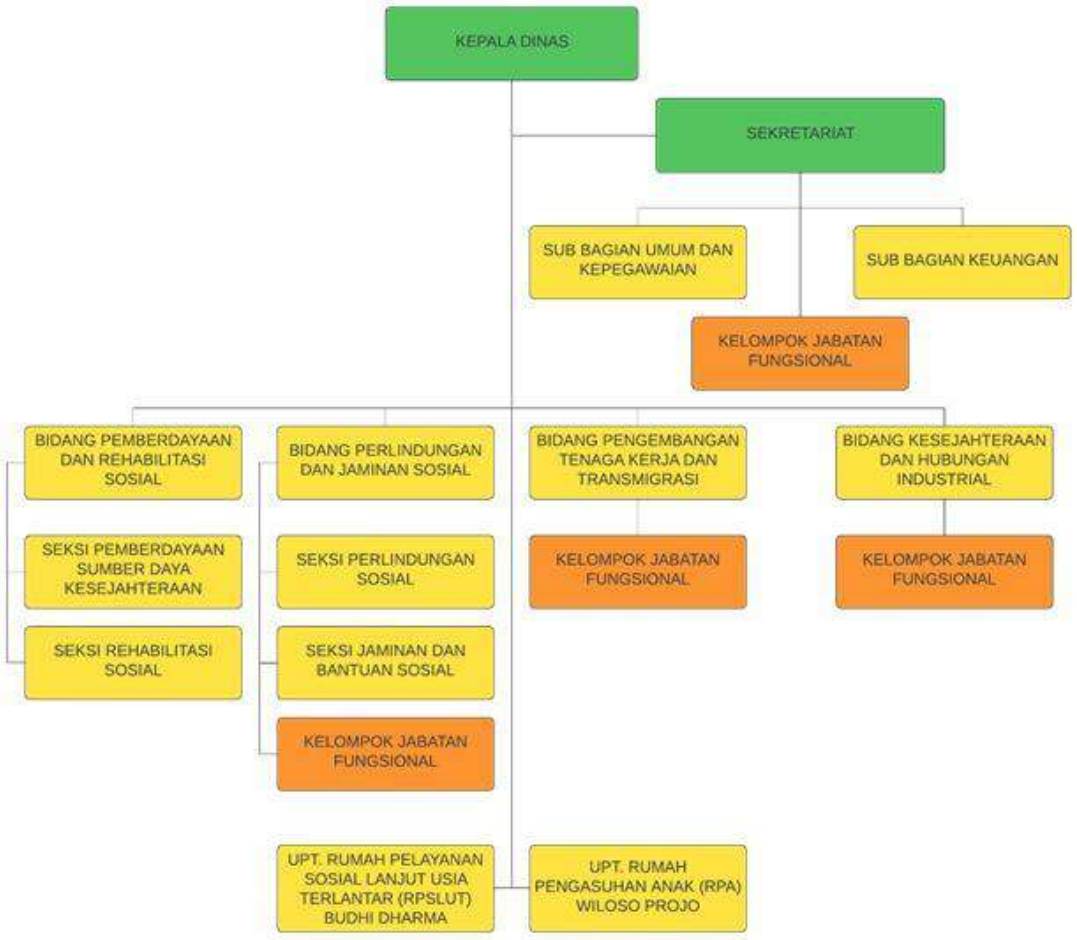

Sumber: Perwal No. 37 Tahun 2023

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki susunan organisasi sebagaimana pada Gambar 2.1 dengan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
   - Tugas:
     membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi
   - Fungsi:
     1) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;

2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
3) pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4) pengoordinasian penyelenggaraan sosial;
5) pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
6) pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
7) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
8) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
9) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
10) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
11) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
12) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
13) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
14) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Sekretariat:
   - Tugas:
     menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
   - Fungsi:
     1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
     2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Dinas;

3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
4) membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
5) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
6) pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
7) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
8) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
9) pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
10) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
11) pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
12) pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
13) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14) pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16) pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan

18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Tugas:
     membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
   - Fungsi:
     1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
     2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan dan jaminan sosial;
     3) pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
     4) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial;
     5) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan jaminan dan bantuan sosial;
     6) pengelolaan data dan informasi sosial;
     7) pendataan, pengolahan, dan analisa data sosial;
     8) pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
     9) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
     10) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
     11) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
     12) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

13) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
   - Tugas:
     melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
   - Fungsi:
     1) pengordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
     2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
     3) pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang
     4) Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
     5) pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
     6) pengoordinasian penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
     7) pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial;
     8) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
     9) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
     10) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
     11) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program

kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Tugas:

  membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan, fasilitasi penyelenggaraan pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi.

- Fungsi:

  1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi;
  3) pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
  5) pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha;
  6) pembinaan dan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
  7) fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
  8) fasilitasi pendampingan produktivitas perusahaan kecil;
  9) perencanaan tenaga kerja;
  10) pelayanan antar kerja;
  11) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
  12) pengelolaan informasi pasar kerja, bursa kerja, dan penempatan tenaga kerja;
  13) perluasan kesempatan kerja dengan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
  14) pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang tenaga kerja;
  15) perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

16) penyiapan bahan pemberian notifikasi izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
17) pelayanan pendaftaran, seleksi, pembekalan, dan penempatan transmigrasi;
18) pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penempatan transmigrasi;
19) pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi;
20) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
25) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
   - Tugas:
     membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan industrial.
   - Fungsi:
     1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;

2) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait kesejahteraan dan hubungan industrial;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
4) pembinaan pengupahan tenaga kerja;
5) pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan pekerja;
6) pembinaan dan pemantauan implementasi jaminan sosial tenaga kerja;
7) penyiapan dan pengusulan Upah Minimum Kota;
8) fasilitasi Dewan Pengupahan Kota;
9) operasional lembaga ketenagakerjaan;
10) pembinaan dan pelayanan sarana hubungan industrial;
11) pelayanan pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
12) verifikasi keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh;
13) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
14) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
16) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
17) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial; dan
18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 112 orang (data per awal Januari 2025) dengan rincian 67 orang ASN (meliputi Struktural dan Ka. Tim Kerja 22 orang, staf 42 orang, P3K 3 orang) dan 45 orang Non ASN (Jasa Lainnya Orang Perseorangan). Data mengenai komposisi pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, dan2.3.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMA	24 orang
2	D3	10 orang
3	S1	64 Orang
4	S2	12 orang
	Jumlah	110 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

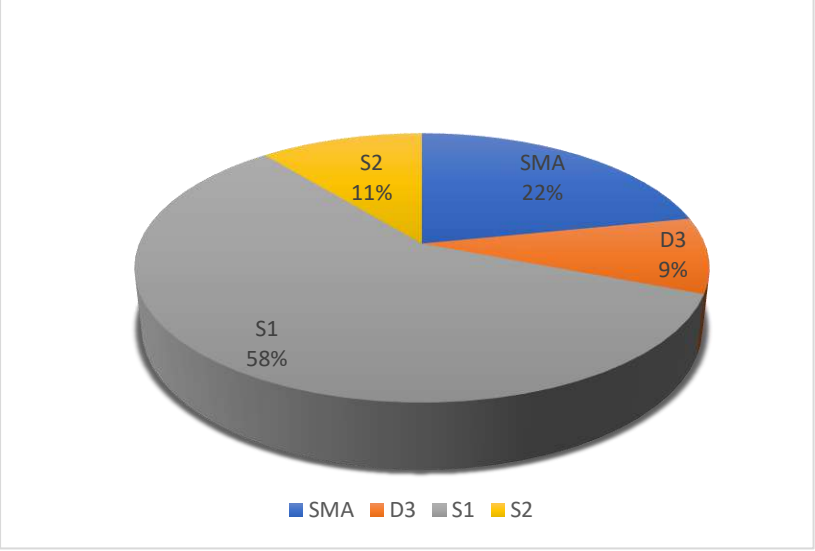

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	10 orang
2.	Golongan III	46 orang
3.	Golongan II	6 orang
4.	Golongan I	-
5.	IX	4 orang
6.	Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP)	44 orang
	Jumlah	110 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Gambar 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

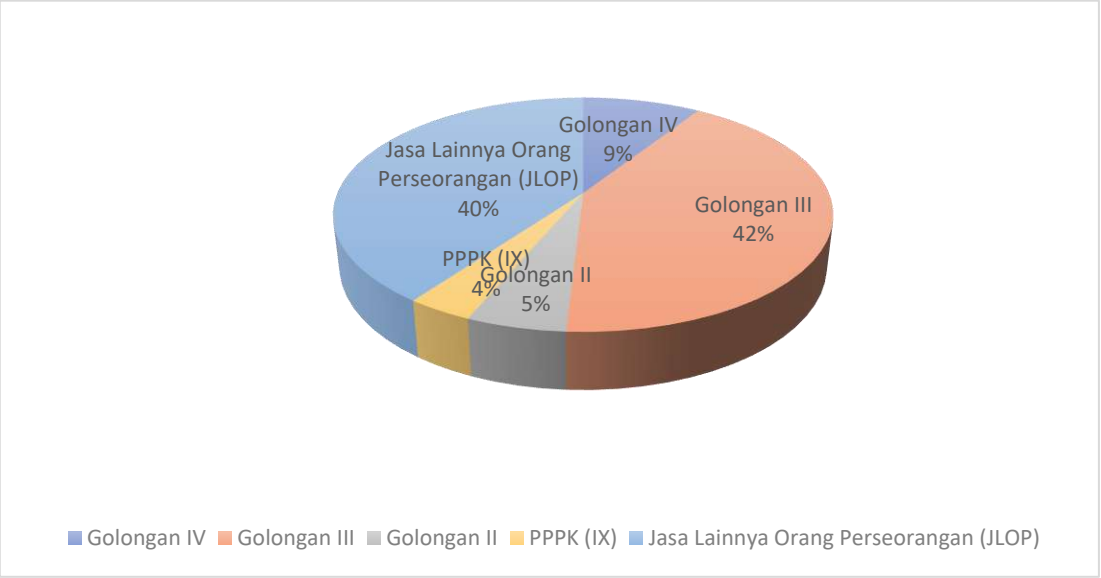

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Bidang	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	4 orang
4.	Ketua Tim Kerja	6 orang
5.	Kepala Subbag	1 orang
6	Kepala Seksi	4 orang
7	Kepala UPT dan KTU UPT	3 orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu	25 orang
9.	Jabatan Fungsional Umum	17 orang
10.	P3K	4 orang
11.	Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP)	44 orang
Jumlah		110 orang

2.1. 3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	AC	30
2.	Air Purifier	1
3.	Bed Set	50
4.	Bor Beton Listrik	1
5.	Bracket Gantung Proyektor	1
6.	Brankas	2
7.	Buku perpustakaan	187
8.	Calculator	12
9.	Dispenser	6
10.	Document Camera/ Visualizer (Camera Video)	4
11.	Eksternal Hardisk	41
12.	Filling Cabinet/kardek	59
13.	Genset	3
14.	Handy Talkie	10
15.	Jam Dinding	11
16.	Kamera Video/Foto Digital	4
17.	Kendaraan roda 4	15
18.	Kipas angin	30
19.	Komputer Tablet	2
20.	Laptop	2
21.	Notebook	23
22.	PC Unit	65
23.	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/makan/tamu/rapat/lipat/hadap	524
24.	Layar LCD Projector	1
25.	LCD Proyektor	8
26.	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/sorog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	212
27.	Audio Mixer	1
28.	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/rapat/sidang/tulis/telepon/besi/ kayu /kubical/bufeet	310
29.	Meja Kursi tamu/sofa/sice	28
30.	Mesin ketik	17
31.	Mesin penghisap debu	1
32.	Mesin Pompa Air	3
33.	Mesin presensi sidik jari	2
34.	Wireless	4

35.	Microphone	7
36.	Monitor	4
37.	Papan Nama	1
38.	Papan Visual/ Data Perangkat	1
39.	Printer	25
40.	Tape Recorder	2
41.	Scanner	2
42.	Sepeda	1
43.	Sepeda Motor	30
44.	Sound System	14
45.	Telephone	3
46.	Tempat sampah	2
47.	Thermogun	1
48.	Timbangan orang/badan/barang	3
49.	Tool kit Set	1
50.	TV	14
51.	UPS	21
52.	White Board	7

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 merupakan landasan evaluasi ungtuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan serta merumuskan permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Proses ini bertujuan untuk merancang strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public, salah satunya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Desk Timbal Balik untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran. Daridata hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 2.5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Adapun pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra OPD Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82,90	85,96	88,8	87,86	-	83,33	87,44	92,33	92,53	-	100,52%	101,72%	103,98%	105,32%	-
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	-	-	-	94,88	-	-	-	-	94,93	-	-	-	-	100,05%
Sasaran 2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah penganggur	6,50	5,71-4,80	9,14-4,86	6,97-7,18	-	9,16	9,13%	7,18	6,07	-	140,86%	40,11%	100,00%	112,95%	
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	-	-	-	-	67,97	-	-	-	-	88,42	-	-	-	-	130,09%
Sasaran 3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase peningkatan upah minimum kota	5,0	1,43	4,48	-	-	8,54	4,08	7,93	-	-	170,71%	285,31%	176,98%	-	-
		Persentase perusahaan yang sudah melaksanakan struktur skala upah	-	-	-	3,8 – 4,6	6,81	-			6,25	7,36				141,72%	108,04%

Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	-	-	-	15,63 %	35,29 %	-	-	-	26,67 %	42,86 %	-	-	-	170,63%	121,43%
Sasaran 5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	A (87,35)	A (87,4)	-	-	-	A (88,57)	AA (90,884)	-	-	-	101,40%	100,98%

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Mencermati tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa selutuh Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah tercapai realisasinya bahkan telah melebihi dari targetnya.

2.1.4.1 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diukur dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan sasaran baru sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran ini mereview dari sasaran lama yaitu Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat.

Pencapaian target sasaran strategis lama yaitu Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat dan selalu tercapai lebih dari 100% sejak tahun 2021. Sedangkan realisasi sasaran strategis baru Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sudah melampaui target yang telah ditentukan. Dengan hasil pencapaian indeks tersebut, maka realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi masuk di atas kategori berprestasi sangat tinggi (> 100%).

Faktor pendorong atau upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan *stakeholder* dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain:
    a. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial;
    b. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
    c. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam;
    d. verfikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

2. Optimalisasi penyelenggaraan pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Tingginya partisipasi dan komitmen yang kuat dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam men*support* optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pelayanan kedaruratan sosial (termasuk penanganan bencana) serta perlindungan dan pemberian jaminan sosial (termasuk verifikasi dan validasi data DTKS);
4. Tersedianya Rumah Layanan Disabilitas sebagai wadah layanan terintegrasi bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebijakan pemberian bantuan sosial baik bersumber dana APBN maupun APBD yang tidak dapat diberikan ganda kepada KPM yang sama, sehingga diperlukan proses verifikasi dan validasi terhadap data penerima bantuan sosial APBN yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI. Kebijakan ini berimplikasi pada tidak dapat terdistribusikannya bansos APBD secara penuh 100 %, karena KPM sasaran telah menerima bansos sejenis dari APBN maupun APBD yang lain.
2) DTKS dari Kementerian Sosial sebagai penyanding data penerima bansos APBD, parameternya belum jelas dan kurang terperinci serta banyak data yang kurang tepat, dinamis/berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses verfikasi dan validasi data penerima bansos. Selain itu Dalam rangka verifikasi validasi DTKS diperlukan mekanisme yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, karena harus dilakukan terlebih dahulu pengolahan data DTKS secara manual (berdasarkan pencermatan DTKS secara online). Hal ini sebagai akibat adanya kebijakan Kemensos bahwa database DTKS dalam format excel tidak diperkenankan diberikan kepada Pemerintah Daerah
3) Organisasi/lembaga sosial mitra dinas sebagian tidak berkegiatan secara intensif dan ada juga PSKS yang sementara waktu tidak berkegiatan karena regenerasi kepengurusan belum berjalan dengan baik;
4) Belum ada shelter terpadu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar usia >18 tahun s.d < 60 tahun yang dikelola oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta dan keterbatasan pelayanan rehabilitasi *Camp Asessment* dan panti (Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas) milik DIY;

5) Sifat kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang sebagian bersifat adang- adang/*unpredictable* sesuai dinamika di lapangan, menyebabkan sulitnya memprediksi kuantitas target dan ketercapaian realisasi kegiatan;
6) Tidak adanya informasi *By Name By Address* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos APBN.

Adapun terkait anggaran dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar Rp 7.108.582.636 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.550.900.261,- atau 92,2%. Penyerapan anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan anggaran bantuan sosial APBD yang tidak terserap maksimal sesuai target sasaran mengingat adanya kebijakan perluasan sasaran penerima bantuan sosial APBN. Sementara itu juga terdapat peristiwa kependudukan pada KPM yaitu meninggal dunia dan pindah ke luar Kota Yogyakarta serta adanya kebijakan tidak diperkenannya dobel penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD. Hal ini menyebabkan target sasaran penerima bantuan sosial APBD menjadi berkurang banyak.

2.1.4.2 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja diukur dengan indikator Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja yang merupakan sasaran baru sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran ini mereview dari sasaran lama yaitu Menurunnya Tingat Pengangguran Terbuka.

Sasaran strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 tidak tercapai, namun dalam rentang tahun 2022 - 2023 tercapai lebih dari 100 %. Target 2022 sebesar 9,12- 4,86 sedangkan realisasi sebesar 7,18 dan target 2023 sebesar 6,97 – 7,18 sedangkan realisasinya sebesar 6,07. Untuk tahun 2024 dengan sasaran baru Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan target 67,97 dan realiasainya sebesar 88,42.

Ketidaktercapaian target di tahun 2021 disebabkan oleh kondisi

pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Kota Yogyakarta bahkan di Indonesia; yang berdampak pada banyaknya penutupan perusahaan yang lebih lanjut berimplikasi pada meningkatnya implementasi kebijakan "merumahkan karyawan" dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai. Hal ini otomatis mempengaruhi melonjaknya angka pengangguran di Kota Yogyakarta. Sedangkan realisasi sasaran strategis baru Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja sudah melampaui target yang telah ditentukan. Dengan hasil pencapaian indeks tersebut, maka realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi masuk dalam kategori berprestasi sangat tinggi > 100% (130,09%)

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya intensitas rekruitmen perusahaan terhadap tenaga kerja sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian;
2. Meningkatkan fasilitasi pelatihan keterampilan kerja dengan substansi pelatihan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dengan kualitas pelatihan keterampilan yang *inline* dengan kondisi kebutuhan dan dinamika pasar kerja, maka diharapkan mampu menjadi daya ungkit penciptaan lapangan kerja baru;
3. Meningkatkan fasilitasi Job Fair dan pembukaan lowongan kerja serta perluasan publikasinya secara online (melalui Jogja Smart Service) dan dilakukan secara intensif;
4. Tingginya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan Padat Karya sebagai upaya perluasan kesempatankerja yang dapat meng*cover* pengganggurran di wilayah lokus untukberkinerja secara aktif dan memperoleh pendapatan;
5. Meningkatkan motivasi bagi para pencari kerja melalui Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan(PBJ) agar siap kerja dan tidak terlalu selektif dalam mencari pekerjaan, sehingga meningkatkan upaya penempatan kerja.

Faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran angka pengangguran menurun adalah sebagai berikut:

1) Ketersediaan lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat belum sesuai baik dari aspek kebutuhan, kompetensi, kepeminatan masyarakat maupun dari aspek lokasi pekerjaan. Akibatnya sebagian lowongan pekerjaan yang ada kurang direspon

secara optimal oleh masyarakat;

2) Jenis pelatihan tertentu kurang mendapatkan animo masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang sesuainya jenis pelatihan yang ada dengan minat masyarakat;
3) Profil data Pengangguran Kota Yogyakarta hasil pendataan Dinsosnakertrans mencerminkan data penganggur dengan usia > 40 tahun lebih banyak dari data penganggur dengan usia ≤40 tahun. Salah satu dampaknya adalah produktivitas tenaga kerja menurun karena kelompok usia menengah-atas yang seharusnya masih produktif malah tidak terserap di pasar kerja. Adapun data penganggur terjadi pada tabel 2.7

Tabel 2.7 Data Penganggur Kota Yogyakarta Tahun 2024
Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kemantren	Kelompok Usia										Total
		16 - 20	21- 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56- 60	60+	
1	Danurejan	14	15	9	5	8	7	14	11	5	1	**89**
2	Gedongtengen	17	51	39	41	32	49	70	52	29	5	**385**
3	Gondokusuman	33	18	9	7	15	11	10	6	8	6	**123**
4	Gondomanan	9	6	7	2	17	17	11	12	6	0	**87**
5	Jetis	13	27	23	17	25	35	37	35	29	6	**247**
6	Kotagede	12	20	21	17	17	22	22	9	19	9	**168**
7	Kraton	12	22	11	8	9	12	22	16	21	7	**140**
8	Mantrijeron	7	7	2	4	2	3	10	3	2	1	**41**
9	Mergangsan	35	22	12	12	16	45	46	42	44	9	**283**
10	Ngampilan	20	21	10	12	11	14	26	13	6	1	**134**
11	Pakualaman	6	8	4	3	6	7	12	15	15	1	**77**
12	Tegalrejo	2	7	2	4	5	8	7	3	2	0	**40**
13	Umbulharjo	20	19	31	26	26	27	32	23	31	6	**241**
14	Wirobrajan	42	40	33	21	28	32	33	17	21	1	**268**
Total		**242**	**283**	**213**	**179**	**217**	**289**	**352**	**257**	**238**	**53**	**2.323**
Grand Total		**1.134**					**1.189**					**2.323**

Kedepan perlu dilakukan beberapa upaya yaitu:

1) Sinkronisasi data pengangguran dengan BPS dalam rangka peningkatan kualitas data pengangguran yang dikoordinasikan oleh Dinsosnakertrans;
2) Kolaborasi lintas sektor dan antar OPD dalam menurunkan pengangguran di Kota Yogyakarta;
3) Fokus intervensi program kegiatan berbasis sasaran Data Pengangguran;

4) Optimalisasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2024 telah tercapai (130,09%). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perekonomian yang lebih lanjut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunnya jumlah pengangguran. Anggaran untuk program pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 3.411.635.810,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.398.543.900,00 atau 99,6 %.

2.1.4.3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Indikator sasaran Meningkatnya Kesejahteraan pekerja adalah persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah. Indikator persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai indikator ukuran kinerja Dinsosnakertrans mulai tahun 2023. Target persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah pada Tahun 2024 tercapai lebih 100% (108,04%). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi pembinaan perusahaan dan jejaring kerja dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Struktur dan Skala Upah.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan Optimalisasi pembinaan perusahaan melalui pendekatan sosiologis psikologis, klasikal dan strategi *door to door* serta melibatkan pengawas ketenagakerjaan DIY dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Struktur dan Skala Upah.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase peningkatan perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman perusahaan terkait peraturan tentang sarana hubungan industrial (diantaranya terkait pengupahan) masih kurang.
2) Belum semua perusahaan mau menyusun dan menerapkan Struktur Skala Upah (SUSU). Sampai Desember 2024 hanya terdapat 127 perusahaan yang telah menyusun dan menerapkan SUSU dari total 1725 perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta;

3) Belum semua perusahaan melaporkan melalui aplikasi Wajib Lapor terkait sarana hubungan industrial termasuk pengupahan di perusahaannya, sehingga Pemerintah Kota agak kesulitan melakukan monitoring evaluasinya;
4) Belum semua perusahaan memenuhi sarana hubungan industrial. Sampai Desember 2024 baru 749 perusahaan yang telah memiliki 2 (dua) atau lebih Sarana Hubungan Industrial dari total 1725 perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta;

Terkait pendanaan, indikator ini ditunjang dengan program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp 1.627.213.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.573.792.539,00 atau 96,71 %.

2.1.4.4 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi

Indikator sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama Transmigrasi adalah persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran. Indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran digunakan sebagai indikator ukuran kinerja Dinsosnakertrans mulai tahun 2023, dimana tahun sebelumnya belum ada sasaran terkait transmigrasi.Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran pada tahun 2024 tercapai lebih 100% (121,43). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi jejaring dan mitra kerja dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi dan upaya motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti program Transmigrasi ke luar daerah serta optimalisasi jejaring dan mitra kerja dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan transmigrasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya terkait kuota peserta masing-masing daerah, lokasi penempatan, dan waktu keberangkatan calon transmigran. Pada tahun 2024, calon transmigran yang mendaftar di Kota Yogyakarta mencapai 37 KK, namun berdasarkan hasil seleksi dan sesuai kebijakan Pusat maka hanya 6 KK yang diberangkatkan di tahun 2024 ke 3 (tiga) lokasi yaitu ke:
    a. Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, (2 KK);
    b. Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. (2 KK);
    c. Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Transmigran Luncuran) (2 KK)
    d. Faktor anggaran yang tersentral di pusat dan DIY.
2) Kebijakan terkait kuota, lokasi transmigrasi, dan anggaran tersentral di Pusat sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya menunggu alokasi dari pusat. Kedepan, akan dilakukan optimalisasi partisipasi warga miskin/DTKS/KSJPS dalam kepesertaaan program transmigrasi. Langkah awal akan dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi serta komunikasi informasi edukasi tentang transmigrasi dengan sasaran warga miskin/DTKS/KSJPS.

Terkait pendanaan, indikator ini ditunjang dengan program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 222.029.225,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 221.289.800,00 atau 99,66%.

2.1.4.5 Capaian Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evalausi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kerja dan Transmigrasi digunakan sebagai indikator kinerja sasaran Dinsosnakertrans mulai tahun 2023. Mencermati tabel 3.13 dan 3.14 bahwa target Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Dinsosnakertrans pada tahun 2024 tercapai 100,98%. Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerjapada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen OPD yang tinggi untuk mewujudkan pimplementasi Reformasi Birokrasi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain Indikator Meningkatnya Reformasi Birojrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan sebagai indikator kinerja sasaran Dinsosnakertrans mulai tahun 2023. Mencermati tabel 3.13 dan 3.14 bahwa target Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Dinsosnakertrans pada tahun 2024 tercapai 100,98%. Dan apabila dibandingkan dengan target 2026, maka realisasi tahun 2024 telah mencapai 103,8 % (sebagaimana tabel 3.13). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen OPD yang tinggi untuk mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan:

1) Tingginya komitmen OPD (pimpinan dan pegawai);

2) Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja;

3) Optimalisasi pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

4) Penyelenggaraan managemen dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman sebagian pegawai tentang pembaharuan dan perubahan;
2) Kurang optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Terkait pendanaan, indikator Meningkatnya Reformasi Birojrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 13.952.960.686,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.957.000.887,00 atau 92,66%. Selanjutnya, untuk realisasi capaian 10 (sepuluh) program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel 3.15, pencapaian target 17 (tujuh belas) indikator program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi semuanya terealisasi ≥ 100 %. Hal ini merefleksikan bahwa kinerja pencapaian sasaran kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai prestasi kinerja Sangat Baik.

2.1.4.6 Capaian Kinerja Program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Adapun pencapaian kinerja program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8

Realisasi Program (*Outcome*) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A (Nilai >80 s.d 90)	A	A (87,4)	A	A	A	AA (90,88)	100%	100%	100%	100,98%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	87,18%	90,42%	90,69%	91,99%	87,47%	90,42%	90,69%	91,99%	104,99%	100%	100%	100%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial;	81,00%	86,98%	-	-	87,47%	95,17%	-	-	107,99%	109,42 %	-	-

		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-
		Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-

		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-
		Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	-	100%	-	-	-	1005	-	-	-	100%	-
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%

		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	-	-	44,20%	45,58%	-	-	44,20%	46,11%	-	-	100%	101,16%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani	-	-	81,25%	100%	-	-	100%	100%	-	-	123,08 %	100%

		layanan di luar Panti Sosial												
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87,30%	87,41%	88,69%	92,83%	82,46%	89,25%	94,08%	92,91%	94,46%	102,11 %	106,07 %	100,09%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
		Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%			100%	100%			100%	100%		

		Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
7	Proram Perencanaan Bencana	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	65,48%	66,69%	69,29%	62,47%	62,92%	68,40%	72,60%	62,98%	96,09%	102,56 %	104,77 %	100,80%
8	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,00%	91,64%	91,95%	-	91,18%	91,77%	91,97%	-	100,2%	100,14 %	100,01 %	-

		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan	-	-	-	92,01%	-	-	-	92,38%	-	-	-	100,40%
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	68,18%	70,18%	75,52%	-	68,00%	75,16%	84,88%	-	99,74%	107,09 %	112,39 %	-
		Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online	-	-	-	53,11%	-	-	-	53,13%	-	-	-	100,04%
10	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,26%	38,26-41,45%	40,39%	42,31%	29,57%	38,27%	40,94%	43,42%	79,36%	100%	101,37 %	102,64%
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
		Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan	-	-	-	15%	-	-	-	16,22%	-	-	-	108,11%

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

2.1.4.7 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 18, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah 1 (satu) pelayanan wajib dasar adalah urusan sosial, dimana pada lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan wajib dasar urusan sosial, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yaitu meliputi:

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar Lansia Terlantar di Luar Panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagikorban bencana;

Adapun Mutu Pelayanan Dasar bagi penerima pelayanan bidang sosial berupa:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas Permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial.

2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas pengasuhan, permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial.
3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses (Rumah Pelayanan Lansia Terlantar), alat bantu,
4. perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pemulasaran. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial.
5. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan sementara, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke layanan kesehatan dasar, pemulangan ke daerah asal. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial.
6. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana diberikan sesuai

dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dians Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9

Realisasi SPM Bidang Sosial

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TARGET	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar urusan sosial terdapat kendala antara lain sebagai berikut:

1) Terdapat kesulitan dalam tahapan pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh layanan bidang sosial yang bersifat adang-adang/*unpredictable*, sehingga sulit dilakukan pendataan sebagai dasar penentuan jumlah target sasaran;
2) Tidak adanya tempat penampungan / shelter untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
3) Kurangnya SDM terlatih JBI (Juru Bahasa Isyarat);
4) Adanya keterbatasan fasilitasi sarana prasarana pelayanan sosial.

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar urusan sosial yang telah dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Data sasaran disusun berdasarkan pelaksanaan SPM tahun sebelumnya;
2. Penguatan dan perluasan jejaring dalam pelaksanaan SPM.

2.1.4.8 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan pada urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan kelompok sasaran meliputi:

- Urusan Sosial: warga miskin, anak balita terlantar; anak terlantar; anak yang berhadapan dengan hukum; anak jalanan; anak dengan kedisabilitasan; anak yang menjadi korban kekerasan; anak yang memerlukan kebutuhan khusus; lanjut usia terlantar; penyandang disabilitas; tuna Susila; gelandangan; pengemis; pemulung; bekas warga binaan lembaga kependudukan; pekerja migran bermasalah sosial; korban bencana alam; korban bencana sosial; fakir miskin; dan keluarga bermasalah sosial ekonomi
- Urusan Ketenagakerjaan: pencari kerja/ penganggur, pekerja, perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh, serta lembaga pelatihan kerja.
- Urusan Transmigrasi: calon transmigran, keluarga transmigran, serta pemerintah daerah tujuan transmigrasi.

2.1.4.9 Mitra Perangkat Daerah dan Kerjsama Daerah

Dalam pelaksanaan pemberian layanan dan pencapaian kinerjanya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan mitra, diantaranya:

- Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Desa PDTT;
- Dinas Sosial DIY
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
- BPS Kota Yogyakarta;
- Inspektorat Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, BPKAD Kota Yogyakarta, BKPSDM Kota Yogyakarta, DPMPTSP Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, BPBD Kota Yogyakarta, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Dinas PerinkopUKM;
- Kemantren dan Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta;

- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Relawan Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Apindo;
- BUMD dan lembaga keuangan yang berkontribusi dalam penyaluran bantuan sosial maupun fasilitasi tenaga kerja (BPD DIY, BNI 46 dan PT. Pos);
- Kerja sama antar daerah terkait transmigrasi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tujuan transmigrasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020-2024, maka masih terdapat permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi:

1. Permasalahan Sosial, antara lain:
    a) Belum ada shelter terpadu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar usia > 18 th s.d < 60 th;
    b) Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan hak-hakpenyandang disabilitas, Lansia dan Kelompok RentanLainnya;
    c) Kelayan anak lulus SMA/ SMK di Rumah Pelayanan Anak Wiloso Projo belum terkoneksi dengan penyedia / pasar kerja;
    d) Kurang optimalnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
    e) Kebijakan program/ database dari Pemerintah Pusat yang sering berubah secara mendadak;
    f) Kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat Bansos untuk Graduasi secara mandiri;
    g) Minimnya pengetahuan masyarakat rentan (Penyandang Disabilitas) terhadap upaya kesiapsiagaan bencana.
2. Permasalahan Ketenagakerjaan, antara lain:
    a) Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta tertinggi di DIY;

b) Usia penganggur hasil pendataan di atas 40 tahun, sehingga sulit terserap di sektor formal;
c) Data pengangguran Dinsosnakertrans berbeda dengan Badan Pusat Statistik;
d) Belum tercipta tenaga kerja yang kompeten;
e) Perusahaan belum sepenuhnya memahami ketentuan ketenagakerjaan disabilitas;
f) Kewenangan pusat terkait program transmigrasi menyebabkan Dinsosnakertrans tidak menentukan Lokasi dan kuota transmigrasi sesuai dengan kebutuhan local Kota Yogyakarta;
g) Perusahaan belum sepenuhnya memahami dan memenuhi 8 sarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Beberapa isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, antara lain:

1. Isu kesejahteraan sosial bagi penduduk yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dengan 5 afirmasi gender (anak, lansia, perempuan, disabilitas dan warga miskin) dengan uraian sebagai berikut:
   a) Perlunya peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial yang efektif, tepat guna, tepat sasaran;
   b) Perlunya peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan fasilitasi dan aksesibilitas;
   c) Perlunya fasilitasi dan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa shelter bagi PPKS;
   d) Perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum, anak terlantar, dan lansia yang terlantar;
   e) Perlunya optimalisasi kapasitas dan keaktifan PSKS.
2. Isu terkait ketenagakerjaaan adalah sebagai berikut:
   a) Masih tingginya angka pengangguran;
   b) Perlunya pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar;
   c) Perlunya kolaborasi komprehensif lintas sektoral dalam penempatan kerja bagi pencari kerja;

d) Perlunya pengembangan aplikasi ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas data dalam menurunkan pengangguran.

3. Isu terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:
   a) Perlunya optimalisasi implementasi UMK pada perusahaan;
   b) Perlunya optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan;
   c) Perlunya optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja di perusahaan;
   d) Perlunya optimalisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial;
   e) Perlunya optimalisasi penyusunan Struktur Skala Upah Perusahaan.

Tabel 2.10
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Potensi Bidang Sosial a) Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan yang aktif. b) Ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial. Potensi Bidang Ketenagakerjaan: a) Tersedianya lembaga pelatihan kerja yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja. b) Tersedianya teknologi informasi untuk memperluas akses pasar kerja.	a) Belum ada shelter terpadu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar usia > 18 th s.d < 60 th;	Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkatpastian Kondisi Ekonomi Global	Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY	a) Perlunya peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial yang efektif, tepat guna, tepat sasaran;
	b) Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya;					b) Perlunya peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan fasilitasi dan aksesibilitas;
	c) Kelayan anak lulus SMA/ SMK di Rumah Pelayanan Anak Wiloso Projo belum terkoneksi dengan penyedia / pasar kerja;					c) Perlunya fasilitasi dan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa shelter bagi PPKS;
	d) Kurang optimalnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;					d) Perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum, anak terlantar, dan lansia yang terlantar;

	e) Kebijakan program/ database dari Pemerintah Pusat yang sering berubah secara mendadak;					e) Perlunya optimalisasi kapasitas dan keaktifan PSKS.
	f) Kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat Bansos untuk Graduasi secara mandiri;					f) Masih tingginya angka pengangguran;
	g) Minimnya pengetahuan masyarakat rentan (Penyandang Disabilitas) terhadap upaya kesiapsiagaan bencana.					g) Perlunya pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar;
	h) Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta tertinggi di DIY;					h) Perlunya kolaborasi komprehensif lintas sektoral dalam penempatan kerja bagi pencari kerja;
	i) Usia penganggur hasil pendataan di atas 40 tahun, sehingga sulit terserap di sektor formal;					i) Perlunya pengembangan aplikasi ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas data dalam menurunkan pengangguran
	j) Data pengangguran Dinsosnakertrans berbeda dengan Badan Pusat Statistik;					j) Perlunya optimalisasi implementasi UMK pada perusahaan;
	k) Belum tercipta tenaga kerja yang kompeten;					k) Perlunya optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan;
	l) Perusahaan belum sepenuhnya memahami ketentuan ketenagakerjaan disabilitas;					l) Perlunya optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja di perusahaan;

	m) Kewenangan pusat terkait program transmigrasi menyebabkan Dinsosnakertrans tidak menentukan Lokasi dan kuota transmigrasi sesuai dengan kebutuhan lokal Kota Yogyakarta;					m) Perlunya optimalisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial;
	n) Perusahaan belum sepenuhnya memahami dan memenuhi 8 sarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).					n) Perlunya optimalisasi penyusunan Struktur Skala Upah Perusahaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Dalam upaya mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi misi yang dijabarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Sedangkan, dari kelima misi yang dijabarkan pada Perda tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung misi yang ketiga, yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal”. Dukungan pada misi tersebut menjadi landasan untuk memperkuat tujuan ketiga dalam Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan” dan mendukung pencapaian sasaran yang kelima, yaitu “Menurunnya kemiskinan masyarakat”.

Berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Yogyakarta Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025-2029. Adapun tujuan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja".

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran strategis perangkat daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.06.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja		Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja (Persentase)	53,4	54,8	54,84	54,89	54,91	54,94	54,96	
		Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial (Persentase)	96,38	96,52	96,55	96,58	96,61	96,64	96,67	
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (Persentase)	16,41	21,7	21,79	21,92	21,94	21,97	21,97	
		Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja (Persentase)	4,45	4,46	4,47	4,48	4,49	4,5	4,5	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun yang ditetapkan serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung tercapainya Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal; dan Meningkatnya keberdayaan masyarakat, disusunlah strategi dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan menggunakan penahapan Renstra sebagaimana Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Akselerasi Penyelenggaraan Layanan Dasar Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan Penyelenggaraan Layanan Dasar Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Penyelenggaraan Layanan Dasar Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam rangka melaksanakan Misi ke-3 Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran yang dijabarkan ke dalam strategi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial; Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja; Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja; dan Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif. Sasaran dan strategi lebih lanjut diimplementasikan sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial, maka dilakukan strategi pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta upaya rehabilitasi sosial yang efektif, terintegrasi, komprehensif dan tepat sasaran meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian bantuan sosial/bantuan modal, pendampingan, penanganan kebencanaan, dan lain-lain. Selain itu implementasi penanganan masalah kesejahteraan sosial ditentukan berdasarkan basis data kemiskinan, sehingga pengelolaan data kemiskinan didorong untuk lebih ditingkatkan akurasinya (baik dalam aspek parameter maupun dari aspek *real time*). Dengan demikian penanganan masalah kesejahteraan sosial akan tepat sasaran.

Peningkatan penghidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara mandiri dan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PPKS. Selaras dengan upaya peningkatan kapasitas keterampilan, maka perlu dilakukan pula upaya peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif.

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

Dalam hal ketenagakerjaan, maka strategi yang dilakukan antara lain

meliputi perluasan kesempatan kerja, pengembangan pelatihan bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar serta dinamika teknologi serta pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0. Adapun di bidang transmigrasi diupayakan optimalisasi penempatan transmigrasi melalui KIE dan pelatihan dalam rangka meningkatkan minat warga miskin untuk bertransmigrasi dan komitmen para transmigran di daerah tujuan. Strategi lainnya adalah optimalisasi advokasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan lokasi transmigrasi agar mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan transmigran di daerah tujuan.

Dalam hal hubungan industrial, dilakukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka optimalisasi implementasi UMK (Upah Minimum Kota) pada perusahaan skala kecil, optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Rumusan arah dan kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
		Meningkatkan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan	
		Meningkatkan rehabilitasi sosial	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

		Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	Meningkatkan PPKS yang tertangani di luar panti sosial	
		Meningkatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	
		Meningkatkan akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	Meningkatkan akurasi data sasaran kemiskinan dan pemutakhiran data PPKS	
		Meningkatkan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan	- Meningkat Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan - Meningkatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana bagi korban bencana	Meningkatkan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial	
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan perencanaan tenaga kerja	Meningkatkan perencanaan tenaga kerja	
		Mengembangkan lapangan kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja (melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	
		Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja	- Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi - Meningkatkan penempatan tenaga kerja	
		Meningkatkan penempatan transmigran	Meningkatkan keberlanjutan peserta transmigrasi	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Memperkuat perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat	Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakata sampai dengan tahun 2029; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.06.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja				Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja (Persentase)		
		Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial			Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial (Persentase)		
			Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

					(PPKS) (Persentase)		
				Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)		Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)		Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosopro jo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

			DHARMA)	Budhi Dharma)			
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosopro jo)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenanga	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

					n Kabupaten/ Kota (Orang)		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosopro jo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01. 0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01. 0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01. 0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01. 0012 - Pemberian Layanan Rujukan	

					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya pelayanan bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Terlaksananya Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya pelayanan bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Terlaksananya Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya pelayanan bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenanga	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

					n Kabupaten/ Kota (Orang)		
			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin		Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan		Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan dan Monev KUBE USEP	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Terfasilitasinya Iuran Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan dan Monev KUBE USEP	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Terfasilitasinya Iuran Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Meningkatnya akurasi data sasaran kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Kemanfaatan Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya pemutakhiran data PPKS		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

						1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Kemanfaatan Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial		Persentase Korban Bencana yang tertangani (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	

				Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (Persentase)		
			Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase Kualitas Perencanaaan Tenaga Kerja (Persentase)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Meningkatnya Kualitas Pelatihan Berbasis Kompetensi		Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal (Persentase)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja		Persentase penempatan tenaga kerja (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya kegiatan antar Kerja di Daerah	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	

				Kabupaten/Kota	Bimbingan Jabatan (Orang)		
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Tersediannya informasi pasar kerja dan pencari kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	

					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja			Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja (Persentase)		

			Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan		Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan (Persentase)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Meningkatnya Penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	

					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
				Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Meningkatnya Jaminan Sosial Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	
					Terlaksanana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	

					Terlaksanana nya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahtera an Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02. 0005 - Pengembang an Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja	
		Meningka tnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmig rasi yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra si (Nilai)		
			Meningk atnya akuntabi litas dan kualitas pelayana n Dinsosna kertrans		Nilai IKM Dinsosnake rtrans (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
					Nilai SAKIP Dinsosnake rtrans (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
					Nilai SPIP Dinsosnake rtrans (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
				Meningka tnya kualitas perencan aan pengendal ian evaluasi dan pelaporan kinerja Dinsosna kertrans	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarka n Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					(Berita Acara)		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinsosnakertrans	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan	

					Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Disediakan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	

					Perizinanny a (Unit)	atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09. 0005 - Pemeliharaa n Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09. 0006 - Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si (Unit)	1.06.01.2.09. 0010 - Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						20.216.983.160		21.985.384.845		23.583.293.870		25.343.307.796		27.006.267.214	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.251.198.415		15.695.400.000		16.999.600.000		18.343.300.000		19.646.800.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinsosnakertrans	Nilai IKM Dinsosnakertrans (Nilai)	87,69	87,7	13.628.856.428	87,71	14.251.198.415	87,72	15.695.400.000	87,73	16.999.600.000	87,74	18.343.300.000	87,75	19.646.800.000	
	Nilai SAKIP Dinsosnakertrans (Nilai)	A	A (88,42-90		A		A		A		A		A		
	Nilai SPIP Dinsosnakertrans (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur (4,367 - 4,50)		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	100%	218.785.940		207.623.832		230.700.000		244.900.000		259.100.000		273.300.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja Dinsosnakertrans	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1	0	1	230.700.000	1	244.900.000	1	259.100.000	1	273.300.000	

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11		11		11		11		11		11		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	74	74		74		74		74		74		74		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.934.160		19.562.675		22.000.000		25.000.000		28.000.000		31.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	5.934.160	11	19.562.675	11	22.000.000	11	25.000.000	11	28.000.000	11	31.000.000	

1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.670.000		2.652.000		3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.670.000	1	2.652.000	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.670.000		2.652.000		3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.670.000	1	2.652.000	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.723.080		3.920.620		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.723.080	1	3.920.620	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.938.720		3.920.620		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.938.720	1	3.920.620	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				178.849.980		172.385.917		189.000.000		196.000.000		203.000.000		210.000.000	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	74	74	178.849.980	74	172.385.917	74	189.000.000	74	196.000.000	74	203.000.000	74	210.000.000	
1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		2.530.000		2.700.000		2.900.000		3.100.000		3.300.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	-	1	2.530.000	1	2.700.000	1	2.900.000	1	3.100.000	1	3.300.000	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5	##########		11.005.431.775		12.131.000.000		13.142.000.000		14.155.000.000		15.167.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	80	##########	70	11.005.431.775	70	12.131.000.000	70	13.142.000.000	70	14.155.000.000	70	15.167.000.000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	13	13		13		13		13		13		13		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		27		27		27		27		27		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				##########		10.886.119.775		12.000.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000	

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	73	##########	70	10.886.119.775	70	12.000.000.000	70	13.000.000.000	70	14.000.000.000	70	15.000.000.000	
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				54.744.000		53.864.000		59.000.000		64.000.000		70.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	9	54.744.000	27	53.864.000	27	59.000.000	27	64.000.000	27	70.000.000	27	75.000.000	
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				65.484.000		65.448.000		72.000.000		78.000.000		85.000.000		92.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	13	10	65.484.000	13	65.448.000	13	72.000.000	13	78.000.000	13	85.000.000	13	92.000.000	
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5	46.846.000		55.258.000		59.900.000		65.600.000		71.200.000		76.800.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	46.846.000	2	55.258.000	2	59.900.000	2	65.600.000	2	71.200.000	2	76.800.000	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.451.000		2.850.000		3.100.000		3.400.000		3.700.000		3.900.000	

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2.451.000	2	2.850.000	2	3.100.000	2	3.400.000	2	3.700.000	2	3.900.000	
1.06.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.012.000		1.804.000		1.900.000		2.100.000		2.300.000		2.500.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.012.000	1	1.804.000	1	1.900.000	1	2.100.000	1	2.300.000	1	2.500.000	
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.304.000		1.752.000		1.900.000		2.100.000		2.200.000		2.400.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	2.304.000	12	1.752.000	12	1.900.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.400.000	
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				39.969.000		48.852.000		53.000.000		58.000.000		63.000.000		68.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	39.969.000	2	48.852.000	2	53.000.000	2	58.000.000	2	63.000.000	2	68.000.000	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85,40%	88.632.000		90.142.000		98.000.000		107.000.000		116.000.000		125.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinsosnakertrans	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	2	88.632.000	3	90.142.000	3	98.000.000	3	107.000.000	3	116.000.000	3	125.000.000	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	112		2		2		2		2		2		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				49.224.000		49.644.000		54.000.000		59.000.000		64.000.000		69.000.000	

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	49.224.000	2	49.644.000	2	54.000.000	2	59.000.000	2	64.000.000	2	69.000.000	
1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						40.498.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		56.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	112	39.408.000	3	40.498.000	3	44.000.000	3	48.000.000	3	52.000.000	3	56.000.000	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			90,30%	457.489.963		570.995.775		624.200.000		683.800.000		739.400.000		796.900.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	12	457.489.963	10	570.995.775	10	624.200.000	10	683.800.000	10	739.400.000	10	796.900.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6		3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2		4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7		12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.197.500		14.278.600		15.000.000		17.000.000		18.000.000		21.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	9.197.500	3	14.278.600	3	15.000.000	3	17.000.000	3	18.000.000	3	21.000.000	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.383.268		95.900.230		105.000.000		115.000.000		124.000.000		134.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6	98.383.268	3	95.900.230	3	105.000.000	3	115.000.000	3	124.000.000	3	134.000.000	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.878.695		90.157.195		99.000.000		108.000.000		117.000.000		126.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	12	54.878.695	10	90.157.195	10	99.000.000	10	108.000.000	10	117.000.000	10	126.000.000	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.827.500		19.573.750		21.000.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	18.827.500	4	19.573.750	4	21.000.000	4	23.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	

1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.825.000		5.700.000		6.200.000		6.800.000		7.400.000		7.900.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	5.825.000	1	5.700.000	1	6.200.000	1	6.800.000	1	7.400.000	1	7.900.000	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				173.233.000		246.267.000		270.000.000		296.000.000		320.000.000		344.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	9	173.233.000	12	246.267.000	12	270.000.000	12	296.000.000	12	320.000.000	12	344.000.000	
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				55.566.000		55.140.000		60.000.000		66.000.000		71.000.000		76.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	55.566.000	2	55.140.000	2	60.000.000	2	66.000.000	2	71.000.000	2	76.000.000	
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				41.579.000		43.979.000		48.000.000		52.000.000		57.000.000		61.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	41.579.000	2	43.979.000	2	48.000.000	2	52.000.000	2	57.000.000	2	61.000.000	
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	183.412.500		220.539.400		242.000.000		264.000.000		286.000.000		308.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22		183.412.500	22	220.539.400	22	242.000.000	22	264.000.000	22	286.000.000	22	308.000.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	53			53		53		53		53		53		

1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000		49.500.000		54.000.000		59.000.000		64.000.000		69.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22	29	25.000.000	22	49.500.000	22	54.000.000	22	59.000.000	22	64.000.000	22	69.000.000	
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.412.500		171.039.400		188.000.000		205.000.000		222.000.000		239.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	53	8	58.412.500	53	171.039.400	53	188.000.000	53	205.000.000	53	222.000.000	53	239.000.000	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.228.549.550		1.364.118.633		1.504.900.000		1.609.600.000		1.764.300.000		1.869.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	9		9	1.364.118.633	9	1.504.900.000	9	1.609.600.000	9	1.764.300.000	9	1.869.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				43.974.000		42.830.000		47.000.000		51.000.000		55.000.000		59.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	43.974.000	2	42.830.000	2	47.000.000	2	51.000.000	2	55.000.000	2	59.000.000	
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.000.000		7.200.000		7.900.000		8.600.000		9.300.000		10.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	9.000.000	1	7.200.000	1	7.900.000	1	8.600.000	1	9.300.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.175.575.550		1.314.088.633		1.450.000.000		1.550.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	9	1.175.575.550	9	1.314.088.633	9	1.450.000.000	9	1.550.000.000	9	1.700.000.000	9	1.800.000.000	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	545.789.700		737.089.000		804.700.000		882.700.000		952.300.000		1.030.800.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	21	0		21	737.089.000	21	804.700.000	21	882.700.000	21	952.300.000	21	1.030.800.000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4		3		3		3		3		3		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	68	60		68		68		68		68		68		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	45		46		46		46		46		46		
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.501.700		23.940.000		26.000.000		28.000.000		31.000.000		33.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	22.501.700	1	23.940.000	1	26.000.000	1	28.000.000	1	31.000.000	1	33.000.000	

1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.488.000		210.377.000		231.000.000		252.000.000		273.000.000		294.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	45	178.488.000	46	210.377.000	46	231.000.000	46	252.000.000	46	273.000.000	46	294.000.000	
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						7.050.000		7.700.000		8.700.000		9.300.000		9.800.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	21	-	-	21	7.050.000	21	7.700.000	21	8.700.000	21	9.300.000	21	9.800.000	
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.800.000		45.722.000		50.000.000		54.000.000		59.000.000		64.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	68	60	42.800.000	68	45.722.000	68	50.000.000	68	54.000.000	68	59.000.000	68	64.000.000	
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				302.000.000		450.000.000		490.000.000		540.000.000		580.000.000		630.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	302.000.000	3	450.000.000	3	490.000.000	3	540.000.000	3	580.000.000	3	630.000.000	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				629.019.500		406.061.000		446.667.100		491.333.810		540.467.190		594.513.909	
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	64,35	65,28%	629.019.500	66,2	406.061.000	67,59	446.667.100	68,52	491.333.810	69,91	540.467.190	69,91	594.513.909	

1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			81,02%			406.061.000		446.667.100		491.333.810		540.467.190		594.513.909	
Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	4		4	406.061.000	4	446.667.100	4	491.333.810	4	540.467.190	4	594.513.909	
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0		105		105		105		105		105		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				51.955.250		211.419.500		232.561.450		255.817.595		281.399.354		309.539.289	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	4	51.955.250	4	211.419.500	4	232.561.450	4	255.817.595	4	281.399.354	4	309.539.289	
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						194.641.500		214.105.650		235.516.215		259.067.836		284.974.620	

Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0	-	105	194.641.500	105	214.105.650	105	235.516.215	105	259.067.836	105	284.974.620	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.042.972.089		2.991.153.595		3.199.878.045		3.335.675.940		3.583.294.624		3.752.496.276	
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial (%)	100	100%	6.726.675	100	64.253.475	100	64.253.475	100	64.253.475	100	64.253.475	100	64.253.475	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100%	514.949.075		516.069.475		537.409.475		560.883.475		586.704.875		615.108.415	
Terlaksananya Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		6.726.675	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				6.726.675		64.253.475		64.253.475		64.253.475		64.253.475		64.253.475	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500	700	6.726.675	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	700	64.253.475	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	81,74	83,17%	343.924.000	83,37	762.389.500	83,56	857.969.850	83,76	869.309.235	83,96	980.023.558	84,16	998.630.414	

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100	343.924.000		2.475.084.120		2.662.468.570		2.774.792.465		2.996.589.749		3.137.387.861	
Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15	310.573.500	15	384.813.850	15	372.679.235	15	457.572.158	15	447.775.474	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350	20		10		10		10		10		10		
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	-		2		2		2		2		2		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	-		25		25		25		25		25		

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	40		40		40		40		40		40		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	260	265		230		230		230		230		230		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				49.275.000		4.700.000		49.590.000		5.170.000		54.549.000		5.687.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	49.275.000	15	4.700.000	15	49.590.000	15	5.170.000	15	54.549.000	15	5.687.000	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				9.697.000		66.251.000		72.876.100		80.163.710		88.180.081		96.998.089	

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	260	265	9.697.000	230	66.251.000	230	72.876.100	230	80.163.710	230	88.180.081	230	96.998.089	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				203.462.000		200.390.000		220.429.000		242.471.900		266.719.090		293.390.999	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	40	203.462.000	40	200.390.000	40	220.429.000	40	242.471.900	40	266.719.090	40	293.390.999	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan						23.802.500		26.182.750		28.801.025		31.681.127		34.849.240	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	-	-	25	23.802.500	25	26.182.750	25	28.801.025	25	31.681.127	25	34.849.240	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.600.000		3.060.000		3.366.000		3.702.600		4.072.860		4.480.146	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	1.600.000	5	3.060.000	5	3.366.000	5	3.702.600	5	4.072.860	5	4.480.146	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				1.820.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	350	20	1.820.000	10	3.400.000	10	3.400.000	10	3.400.000	10	3.400.000	10	3.400.000	

	Kabupaten/Kota (Orang)														
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				8.070.000		8.970.000		8.970.000		8.970.000		8.970.000		8.970.000	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	5	8.070.000	2	8.970.000	2	8.970.000	2	8.970.000	2	8.970.000	2	8.970.000	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100%	514.949.075		516.069.475		537.409.475		560.883.475		586.704.875		615.108.415	
Terlaksananya pelayanan bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	150		150	451.816.000	150	473.156.000	150	496.630.000	150	522.451.400	150	550.854.940	

	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	55	55		230		230		230		230		230		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				220.030.600		213.400.000		234.740.000		258.214.000		284.035.400		312.438.940	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	55	195	220.030.600	230	213.400.000	230	234.740.000	230	258.214.000	230	284.035.400	230	312.438.940	
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				208.191.800		238.416.000		238.416.000		238.416.000		238.416.000		238.416.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	30	208.191.800	150	238.416.000	150	238.416.000	150	238.416.000	150	238.416.000	150	238.416.000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPA WILOSO PROJO)	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	81,74		627.169.400	83,37	727.613.900	83,56	756.748.500	83,76	788.796.560	83,96	824.049.426	84,16	862.827.578	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100	627.169.400		2.475.084.120		2.662.468.570		2.774.792.465		2.996.589.749		3.137.387.861	
Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20		20	727.613.900	20	756.748.500	20	788.796.560	20	824.049.426	20	862.827.578	

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20		20		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20		20		20		20		20		20		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20		20		20		20		20		20		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				277.523.000		291.346.000		320.480.600		352.528.660		387.781.526		426.559.678	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20	277.523.000	20	291.346.000	20	320.480.600	20	352.528.660	20	387.781.526	20	426.559.678	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				41.003.500		49.772.000		49.772.000		49.772.000		49.772.000		49.772.000	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20	41.003.500	20	49.772.000	20	49.772.000	20	49.772.000	20	49.772.000	20	49.772.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				99.737.800		228.763.000		228.763.000		228.763.000		228.763.000		228.763.000	

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20	99.737.800	20	228.763.000	20	228.763.000	20	228.763.000	20	228.763.000	20	228.763.000	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.905.100		157.732.900		157.732.900		157.732.900		157.732.900		157.732.900	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	20	8.905.100	20	157.732.900	20	157.732.900	20	157.732.900	20	157.732.900	20	157.732.900	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	81,74	100%	1.556.929.614	83,37	1.436.896.720	83,56	1.520.906.220	83,76	1.613.316.670	83,96	1.714.968.165	84,16	1.826.784.809	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100	1.556.929.614		2.475.084.120		2.662.468.570		2.774.792.465		2.996.589.749		3.137.387.861	
Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65		58	1.436.896.720	58	1.520.906.220	58	1.613.316.670	58	1.714.968.165	58	1.826.784.809	
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65		58		58		58		58		58		

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65		58		58		58		58		58		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1		1		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				986.515.500		840.095.000		924.104.500		1.016.514.950		1.118.166.445		1.229.983.089	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65	986.515.500	58	840.095.000	58	924.104.500	58	1.016.514.950	58	1.118.166.445	58	1.229.983.089	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				58.898.000		55.448.000		55.448.000		55.448.000		55.448.000		55.448.000	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65	58.898.000	58	55.448.000	58	55.448.000	58	55.448.000	58	55.448.000	58	55.448.000	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.130.000		12.760.000		12.760.000		12.760.000		12.760.000		12.760.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	4.130.000	1	12.760.000	1	12.760.000	1	12.760.000	1	12.760.000	1	12.760.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				497.386.114		528.593.720		528.593.720		528.593.720		528.593.720		528.593.720	

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65	497.386.114	58	528.593.720	58	528.593.720	58	528.593.720	58	528.593.720	58	528.593.720	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.251.423.000		2.087.807.500		2.144.329.700		2.206.504.120		2.274.895.982		2.350.127.029	
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan (Persentase)	64,19	64,19	2.251.423.000	64,25	382.000.000	64,29	382.000.000	64,32	382.000.000	64,35	382.000.000	64,38	382.000.000	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	-		2.087.807.500		2.144.329.700		2.206.504.120		2.274.895.982		2.350.127.029	
Terfasilitasinya Iuran Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.898	-	-	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin			-	-		382.000.000		382.000.000		382.000.000		382.000.000		382.000.000	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.898	-	-	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	1.898	382.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan	Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri (%)	46,11	53,9	65.130.000	55,71	347.835.000	57,97	382.618.500	60,29	420.880.350	64,62	462.968.385	65,38	509.265.223	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	2.251.423.000		2.087.807.500		2.144.329.700		2.206.504.120		2.274.895.982		2.350.127.029	

Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan dan Monev KUBE USEP	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3.670	3.670	65.130.000	1.498	347.835.000	1.498	382.618.500	1.498	420.880.350	1.498	462.968.385	1.498	509.265.223	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				65.130.000		347.835.000		382.618.500		420.880.350		462.968.385		509.265.223	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3.670	3.670	65.130.000	1.498	347.835.000	1.498	382.618.500	1.498	420.880.350	1.498	462.968.385	1.498	509.265.223	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase)	95,59	96,62		96,65	1.357.972.500	96,68	1.379.711.200	96,71	1.403.623.770	96,74	1.429.927.597	96,77	1.458.861.806	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	2.251.423.000		2.087.807.500		2.144.329.700		2.206.504.120		2.274.895.982		2.350.127.029	
Meningkatnya akurasi data sasaran kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	144.101	144.101	333.484.000	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				333.484.000		1.140.585.500		1.140.585.500		1.140.585.500		1.140.585.500		1.140.585.500	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	144.101	144.101	333.484.000	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	144.101	1.140.585.500	

Meningkatnya Kemanfaaatan Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38.183	38.183	1.852.809.000	33.507	217.387.000	33.507	239.125.700	33.507	263.038.270	33.507	289.342.097	33.507	318.276.306	
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				1.852.809.000		217.387.000		239.125.700		263.038.270		289.342.097		318.276.306	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38.183	38.183	1.852.809.000	33.507	217.387.000	33.507	239.125.700	33.507	263.038.270	33.507	289.342.097	33.507	318.276.306	
Terlaksananya pemutakhiran data PPKS						0		0		0		0		0	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				513.326.150		480.762.650		499.110.000		550.180.000		601.350.000		662.330.000	
Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang tertangani (Persentase)	100	100	513.326.150	100	480.762.650	100	499.110.000	100	550.180.000	100	601.350.000	100	662.330.000	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100	312.289.650		158.383.000		164.510.000		175.280.000		186.050.000		196.830.000	
Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100	158.383.000	100	164.510.000	100	175.280.000	100	186.050.000	100	196.830.000	

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65		65		65		65		65		65		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65		65		65		65		65		65		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				195.911.500		154.623.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	150	195.911.500	100	154.623.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				4.410.000		3.100.000		3.800.000		4.500.000		5.200.000		5.900.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65	4.410.000	65	3.100.000	65	3.800.000	65	4.500.000	65	5.200.000	65	5.900.000	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				715.000		660.000		710.000		780.000		850.000		930.000	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	65	65	715.000	65	660.000	65	710.000	65	780.000	65	850.000	65	930.000	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100	312.289.650		322.379.650		334.600.000		374.900.000		415.300.000		465.500.000	

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	69	69	312.289.650	69	322.379.650	69	334.600.000	69	374.900.000	69	415.300.000	69	465.500.000	
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	3	3		3		3		3		3		3		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				4.680.000		4.350.000		4.600.000		4.900.000		5.300.000		5.500.000	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	3	3	4.680.000	3	4.350.000	3	4.600.000	3	4.900.000	3	5.300.000	3	5.500.000	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				307.609.650		318.029.650		330.000.000		370.000.000		410.000.000		460.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	69	69	307.609.650	69	318.029.650	69	330.000.000	69	370.000.000	69	410.000.000	69	460.000.000	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.171.643.830		5.215.374.130		5.769.955.873		6.230.488.316		6.690.229.009		7.149.169.702	

2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				299.434.200		215.619.900		237.000.000		258.000.000		280.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja (Persentase)	69,23	69,23	299.434.200	69,23	215.619.900	69,23	237.000.000	69,23	258.000.000	69,23	280.000.000	69,23	300.000.000	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			100	299.434.200		215.619.900		237.000.000		258.000.000		280.000.000		300.000.000	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	299.434.200	1	215.619.900	1	237.000.000	1	258.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				291.340.200		215.619.900		237.000.000		258.000.000		280.000.000		300.000.000	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	291.340.200	1	215.619.900	1	237.000.000	1	258.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.562.422.410		1.967.691.930		2.162.647.623		2.358.988.316		2.554.229.009		2.750.669.702	
Meningkatnya Kualitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal (Persentase)	92,01	92,31	1.562.422.410	92,49	1.967.691.930	92,78	2.162.647.623	93,06	2.358.988.316	93,61	2.554.229.009	93,61	2.750.669.702	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			100	1.348.378.160		1.748.406.930		1.923.247.623		2.098.088.316		2.272.929.009		2.447.769.702	
Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	344	346	1.348.378.160	344	1.748.406.930	344	1.923.247.623	344	2.098.088.316	344	2.272.929.009	344	2.447.769.702	
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.348.378.160		1.748.406.930		1.923.247.623		2.098.088.316		2.272.929.009		2.447.769.702	

Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	344	346	1.348.378.160	344	1.748.406.930	344	1.923.247.623	344	2.098.088.316	344	2.272.929.009	344	2.447.769.702	
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			49,21	184.759.250		190.000.000		209.000.000		228.000.000		247.000.000		266.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	30	30	184.759.250	30	190.000.000	30	209.000.000	30	228.000.000	30	247.000.000	30	266.000.000	
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				184.759.250		190.000.000		209.000.000		228.000.000		247.000.000		266.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	30	30	184.759.250	30	190.000.000	30	209.000.000	30	228.000.000	30	247.000.000	30	266.000.000	
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			1,79	14.390.000		14.390.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	20	20	14.390.000	20	14.390.000	20	15.000.000	20	17.000.000	20	18.000.000	20	20.000.000	
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				14.390.000		14.390.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	20	20	14.390.000	20	14.390.000	20	15.000.000	20	17.000.000	20	18.000.000	20	20.000.000	
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,43	14.895.000		14.895.000		15.400.000		15.900.000		16.300.000		16.900.000	

Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	5	5	14.895.000	5	14.895.000	5	15.400.000	5	15.900.000	5	16.300.000	5	16.900.000	
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				14.895.000		14.895.000		15.400.000		15.900.000		16.300.000		16.900.000	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	5	5	14.895.000	5	14.895.000	5	15.400.000	5	15.900.000	5	16.300.000	5	16.900.000	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				2.526.543.800		1.841.573.800		2.064.000.000		2.187.500.000		2.312.000.000		2.435.500.000	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	53,13	53,15	2.526.543.800	53,19	1.841.573.800	53,23	2.064.000.000	53,27	2.187.500.000	53,31	2.312.000.000	53,31	2.435.500.000	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			12,2	2.331.279.700		1.635.440.000		1.838.000.000		1.941.000.000		2.045.000.000		2.148.000.000	
Terlaksananya kegiatan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	230	230		230	1.635.440.000	230	1.838.000.000	230	1.941.000.000	230	2.045.000.000	230	2.148.000.000	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	362	362		362		362		362		362		362		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	550	550		550		550		550		550		550		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				27.100.000		12.440.000		13.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000	

Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	550	450	27.100.000	550	12.440.000	550	13.000.000	550	14.000.000	550	16.000.000	550	18.000.000	
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				28.610.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		30.000.000	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	230	180	28.610.000	230	23.000.000	230	25.000.000	230	27.000.000	230	29.000.000	230	30.000.000	
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				2.275.569.700		1.600.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	362	880	2.275.569.700	362	1.600.000.000	362	1.800.000.000	362	1.900.000.000	362	2.000.000.000	362	2.100.000.000	
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			96,43	187.582.100		201.371.900		221.000.000		241.000.000		261.000.000		281.000.000	
Tersedianya informasi pasar kerja dan pencari kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	100	100		100	201.371.900	100	221.000.000	100	241.000.000	100	261.000.000	100	281.000.000	
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50	50		50		50		50		50		50		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				85.722.100		102.871.900		113.000.000		123.000.000		133.000.000		144.000.000	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	100	100	85.722.100	100	102.871.900	100	113.000.000	100	123.000.000	100	133.000.000	100	144.000.000	
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				101.860.000		98.500.000		108.000.000		118.000.000		128.000.000		137.000.000	

Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50	50	101.860.000	50	98.500.000	50	108.000.000	50	118.000.000	50	128.000.000	50	137.000.000	
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				7.682.000		4.761.900		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	
Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	10	10	7.682.000	10	4.761.900	10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.000.000	10	6.500.000	
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				7.682.000		4.761.900		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	10	10	7.682.000	10	4.761.900	10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.000.000	10	6.500.000	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.783.243.420		1.190.488.500		1.306.308.250		1.426.000.000		1.544.000.000		1.663.000.000	
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan (Persentase)	17,72	28,84	1.783.243.420	18,2	1.190.488.500	18,51	1.306.308.250	18,82	1.426.000.000	19,13	1.544.000.000	19,14	1.663.000.000	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7,54	201.566.000		24.920.000		27.000.000		29.000.000		31.000.000		33.000.000	
Meningkatnya Penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU)	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	30	30	201.566.000	30	24.920.000	30	27.000.000	30	29.000.000	30	31.000.000	30	33.000.000	

	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	75	75		75		75		75		75		75		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				4.788.000		12.938.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	75	25	4.788.000	75	12.938.000	75	14.000.000	75	15.000.000	75	16.000.000	75	17.000.000	
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				10.868.000		11.982.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000	
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	30	15	10.868.000	30	11.982.000	30	13.000.000	30	14.000.000	30	15.000.000	30	16.000.000	
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		15,65			0		0		0		0		0	
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				201.566.000		0		0		0		0		0	

Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		362	201.566.000		0		0		0		0		0	
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			46.09	1.556.021.420		1.165.568.500		1.279.308.250		1.397.000.000		1.513.000.000		1.630.000.000	
Meningkatnya Jaminan Sosial Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	1.556.021.420	1	1.165.568.500	1	1.279.308.250	1	1.397.000.000	1	1.513.000.000	1	1.630.000.000	
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	24	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	4	4		4		4		4		4		4		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3.539	218		3.539		3.539		3.539		3.539		3.539		
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	1	2		1		1		1		1		1		

2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				202.855.000		167.755.000		184.000.000		201.000.000		218.000.000		234.000.000	
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	4	4	202.855.000	4	167.755.000	4	184.000.000	4	201.000.000	4	218.000.000	4	234.000.000	
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				37.836.000		33.500.000		36.000.000		40.000.000		43.000.000		46.000.000	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	24	24	37.836.000	24	33.500.000	24	36.000.000	24	40.000.000	24	43.000.000	24	46.000.000	

2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				68.363.000		77.016.000		84.000.000		92.000.000		100.000.000		109.000.000	
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	1	1	68.363.000	1	77.016.000	1	84.000.000	1	92.000.000	1	100.000.000	1	109.000.000	
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				24.134.000		54.290.000		59.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	24.134.000	1	54.290.000	1	59.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1.222.833.420		833.007.500		916.308.250		999.000.000		1.082.000.000		1.166.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3.539	218	1.222.833.420	3.539	833.007.500	3.539	916.308.250	3.539	999.000.000	3.539	1.082.000.000	3.539	1.166.000.000	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				240.881.400		244.444.900		267.000.000		292.000.000		317.000.000		342.000.000	

3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				240.881.400		244.444.900		267.000.000		292.000.000		317.000.000		342.000.000	
Meningkatnya keberlanjutan peserta transmigrasi	Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan (%)	6	100	240.881.400	6	244.444.900	6	267.000.000	6	292.000.000	6	317.000.000	6	342.000.000	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	240.881.400		244.444.900		267.000.000		292.000.000		317.000.000		342.000.000	
Tersedianya KK calon transmigran yang memenuhi kriteria penempatan transmigran sesuai kuota penempatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	240.881.400	2	244.444.900	2	267.000.000	2	292.000.000	2	317.000.000	2	342.000.000	
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	8	7		8		8		8		8		8		
	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	8	10		8		8		8		8		8		
3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				98.078.000		92.594.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		129.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	98.078.000	2	92.594.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	129.000.000	

3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				98.195.100		108.000.000		119.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	8	7	98.195.100	8	108.000.000	8	119.000.000	8	130.000.000	8	140.000.000	8	150.000.000	
3.32.03.2.01.0006 - Pelatihan Transmigrasi				44.608.300		43.850.900		48.000.000		52.000.000		57.000.000		63.000.000	
Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	8	10	44.608.300	8	43.850.900	8	48.000.000	8	52.000.000	8	57.000.000	8	63.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

			1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan (rehabsos)	
			1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan (linsos)	
			1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja	Persen	54,8	54,84	54,89	54,91	54,94	54,96	IKU
2	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial	Persen	96,52	96,55	96,58	96,61	96,64	96,67	IKU
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	21,7	21,79	21,92	21,94	21,97	21,97	IKU
4	Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja	Persen	4,46	4,47	4,48	4,49	4,5	4,5	IKU

Indikator Kinerja Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja mendukung Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	IKK
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	IKK
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	IKK
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase (%)	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	IKK
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	38.175,42	39.722,33	41.269,24	42.816,15	44.363,06	45.909,97	IKK
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase (%)	4,58%	5,28%	5,97%	6,67%	7,36%	8,06%	IKK
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase (%)	96,02%	96,09%	96,16%	96,23%	96,30%	96,30%	IKK

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut mendukung indikator yang merupakan amanat dari Pemerintah Pusat, salah satunya Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN). Dalam rangka menghadapi dan menyelesaikan isu kependudukan yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan ketenagakerjaan seperti kemiskinan dan pengangguran, serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Untuk dapat mengimplementasikan GDPK ke dalam perencanaan pembangunan di daerah, maka perlu disusun Peta PJPK. PJPK disusun setiap 5 tahun sekali sebagai *living document* dengan di dalamnya termasuk rencana aksi. PJPK Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Aksi perlu diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah agar arah pembangunan kependudukan yang berkaitan dengan persoalan sosial dan ketenagakerjaan di daerah selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan tujuan, indikator, dan capaian antara pemerintah pusat dan daerah. Tabel berikut adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029.

Tabel 4.6 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan "Bangga Kencana" sesuai Tugas dan Fungsi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

No	Indikator	Data Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tingkat Kemiskinan	6.26	5,84 – 6,26	5,55 – 6,25	5,54 – 6,24	5,53 – 6,23	5,47 – 6,22
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	64.19	62,69 - 66,19	63,19 - 66,69	63,69 - 67,79	64,19 - 67,69	64,69 - 68,19
3.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	34	35	36	37	38	39
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.8	5,42 – 5,80	5,41 – 5,71	5,30 – 5,61	5,20 – 5,51	4,97- 5,41

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2025

Rencana aksi untuk mencapai indikator Tingkat Kemiskinan adalah dengan melaksanakan:

1. Koordinasi dan Sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
2. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan;

3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
5. Pendataan Fakir Miskin;
6. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
7. Perluasan Kesempatan Kerja;
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
9. Bantuan Permakanan;
10. Bantuan Sandang;
11. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
12. Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin;
13. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pekerja Rentan;
14. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

Adapun rencana aksi untuk mencapai indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita dilakukan dengan melaksanakan Pendataan Penganggur. Sedangkan, rencana aksi untuk mencapai indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal dilakukan dengan melaksanakan Diseminasi Unit Layanan Disabilitas. Terakhir, rencana aksi untuk mencapai indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dilakukan dengan melaksanakan:

1. Pendataan Penganggur;
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Siswa di Lembaga Bursa Kerja Khusus Kota Yogyakarta;
3. Diseminasi Unit Layanan Disabilitas;
4. Padat Karya Infrastruktur;
5. Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri;
7. Diseminasi Tenaga Kerja Asing;
8. Penyebarluasan Informasi dan Pengetahuan Padat Karya Infrastruktur;
9. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
10. Pelayanan dan Penyediaan informasi Pasar Kerja Online;
11. Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja di Bursa Kerja Khusus;
12. Peningkatan Kapasitas Forum Bursa Kerja Khusus;
13. Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja (Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI));
14. Penyuluhan Mekanisme dan Sistem Antar Kerja;
15. Bimtek Petugas Antar Kerja;
16. Pameran Bursa Kerja/Job Fair;
17. Pelatihan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia;

Berdasarkan data indikator Bangga Kencana di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan PJPK dalam mencapai target pembangunan keluarga berkualitas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, subkegiatan, serta indikator kinerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, nasional, serta tantangan global yang berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan melalui transmigrasi.

Melalui Renstra ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mampu:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Memberikan perlindungan ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan dan formal, melalui fasilitasi program jaminan sosial.
4. Mendukung pemerataan pembangunan melalui fasilitasi penempatan transmigrasi.

Kesimpulan Substansial

Renstra ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.
2. Mendorong penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
3. Mengurangi angka kemiskinan dan kerentanan sosial dengan pendekatan rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi.

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2025–2029 mengacu pada:

- RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 sebagai dokumen induk pembangunan daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta kebijakan kementerian terkait.
- Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan.
- Pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam mendukung pelaksanaan program.

Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan, dilakukan mekanisme:

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala terhadap capaian indikator kinerja utama.
2. Pengendalian program melalui rapat koordinasi, evaluasi triwulanan, dan laporan kinerja tahunan (LKIP).
3. Review dan penyesuaian rencana apabila terjadi perubahan kebijakan nasional maupun dinamika kebutuhan masyarakat.
4. Pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Renstra ini sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil Makmur, Lestari dan berkeadaban dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

POHON KINERJA

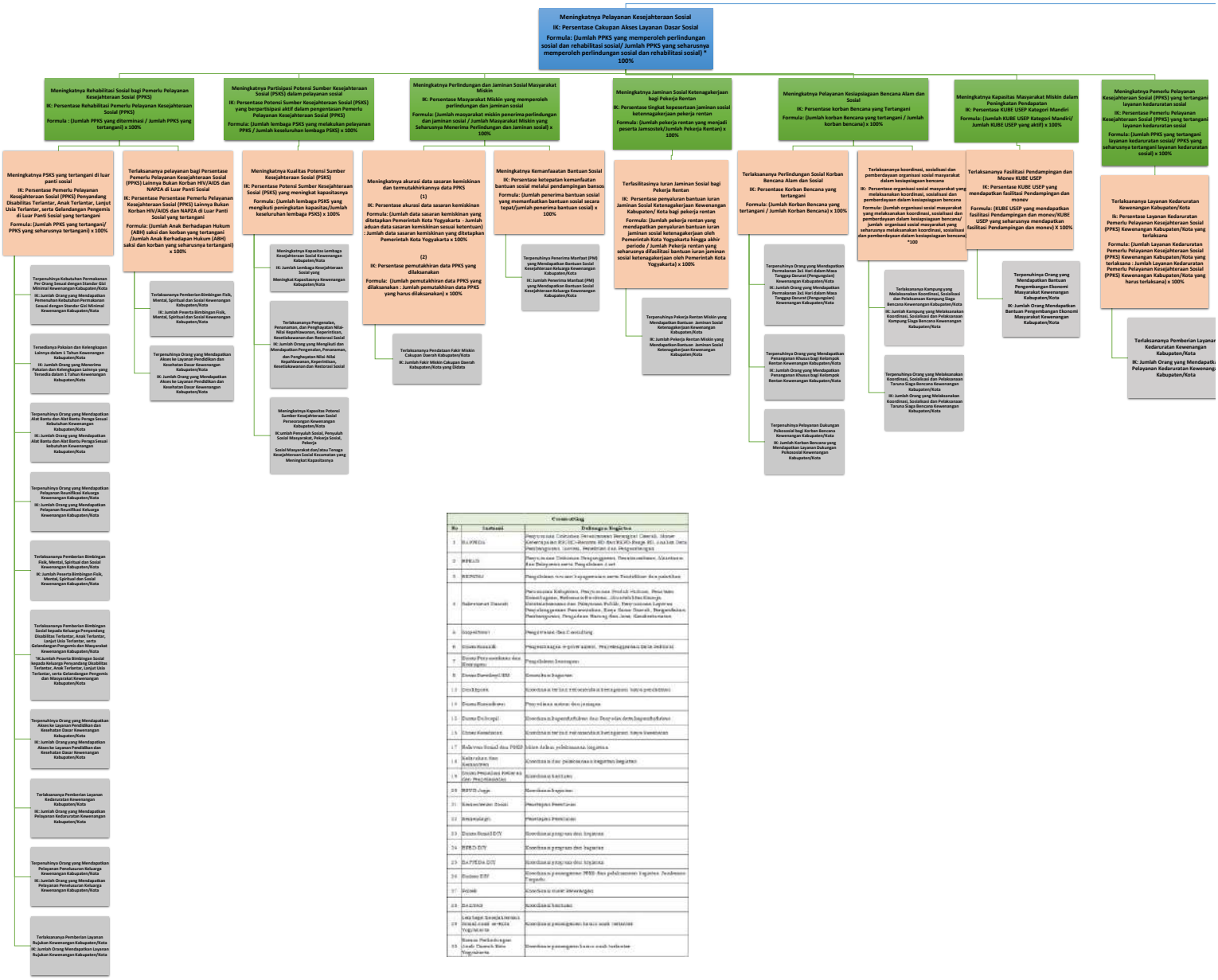

No	Instansi	Dukungan Kegiatan
1	BAPPEDA	Penyusunan Database Kemiskinan Pemerintah Daerah, Monev Kewenangan RTLH, Monitoring RD dan RKPD Bagi RT, Analisis Data Pendukung (survei, monitor dan pengawasan)
2	BPBLH	Penyusunan Database Penanggulangan Kemiskinan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPPPD	Pengelolaan sumber kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten, Penyusunan Profil Miskin, Peraturan Kebijakan, Rekomendasi Program, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Profil, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kesehatan	Pengawasan e-government, Pengelolaan Data Informasi
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan Informasi
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinasi Kegiatan
9	Dinas Kesehatan	Koordinasi terkait rekomendasi kelengkapan kaya perekonomi
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan dan pelaporan data kependudukan
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi dan pelaporan kegiatan kegiatan
12	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Koordinasi Kegiatan
13	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Koordinasi Kegiatan
14	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
15	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
16	Kantor Pos Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
17	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Koordinasi program dan kegiatan
18	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
19	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
20	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
21	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
22	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
23	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
24	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan
25	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta	Koordinasi program dan kegiatan

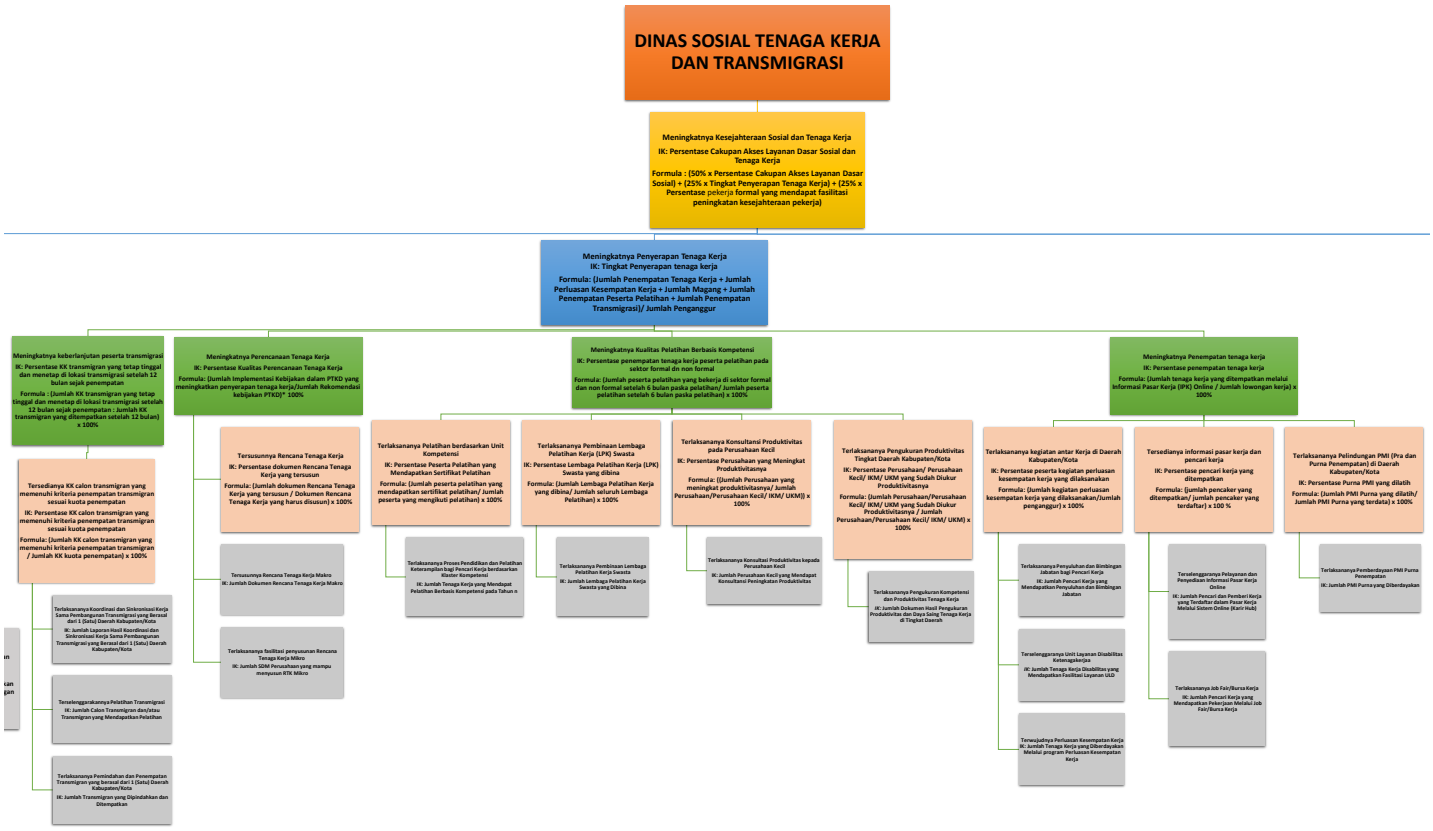

Cascade tidak

No	Tautan	Dukungan Kegiatan
1	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Aksesi Kesempatan RENJA Perangkat DT dan RESD, Renja DT, Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pendataan dan Pengambangan
2	DPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pelaksanaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta Pengelolaan Aset
3	INSPEKTORAT	Pengawasan internal terhadap semua Perangkat Daerah dan pelaksanaan
4	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kebijakan, Pemerintah Produk Hukum, Pemerintah Kesejahteraan, Kebutuhan Pendukung, Aksesibilitas Kantor, Keterbukaan dan Pelayanan Publik, Pemerintah Layanan Penyelenggaraan, Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Pelayanan, Pengelolaan Barang, dan lain lainnya
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kesehatan	Pengelolaan e-government, Penyelenggaraan Data Terintegrasi
7	Dinas Pemberdayaan dan Kependudukan	Pengelolaan Informasi
8	Dinas Perhubungan	Konsultasi kegiatan
9	Dinas Kominfo	Pengelolaan sistem dan jaringan aplikasi serta koordinasi dan konsultasi pelaksanaannya
10	Dinas Dikbud	Koordinasi Implementasi dan Pengelolaan Data Implementasinya
11	Kelurahan dan Kecamatan	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kegiatan
12	Kesatuan POLI	Pelayanan Perizinan
13	Pemerintah Kabupaten	Pelayanan Perizinan
14	Kesatuan	Pelayanan Perizinan
15	Dukcapil/DIY	Koordinasi dan konsultasi Kependudukan
16	BPR	Koordinasi dan pengelolaan Keuangannya
17	BAPPEDA DIY	Koordinasi program dan kegiatan

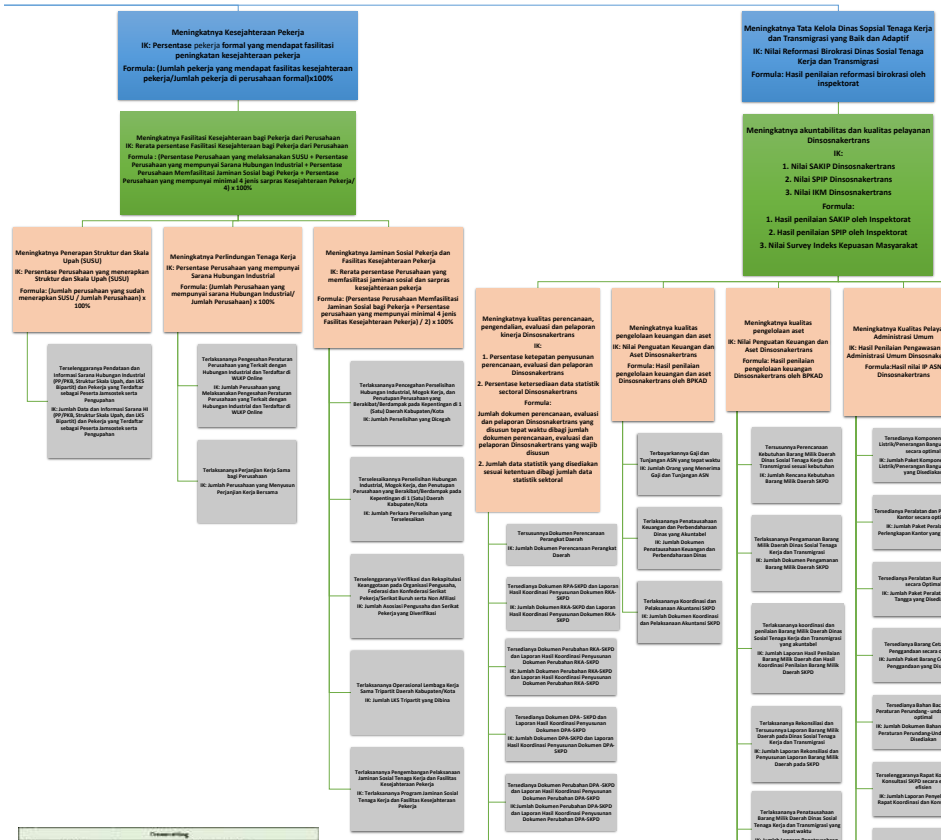

Crosscutting		
No	Instansi	Dukungan Kegiatan
1	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Hasil Koordinasi dan Rekomendasi Perencanaan Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Pelaporan Bidang, Kumulasi Kinerja, Fasilitasi Kerjasama dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Perbatasan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesejahteraan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Geospasial
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

Crosscutting		
No	Instansi	Dukungan Kegiatan
1	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Hasil Koordinasi dan Rekomendasi Perencanaan Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Pelaporan Bidang, Kumulasi Kinerja, Fasilitasi Kerjasama dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Perbatasan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesejahteraan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Geospasial
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

Cascading Kinerja
Dinsosnakertrans 2025-2029

No	Nama Perangkat daerah	Sasaran	Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
1	Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial	(Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial/ Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial) x 100%	1.1.1 Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Jumlah lembaga PSKS yang melakukan pelayanan PPKS / Jumlah keseluruhan lembaga PSKS) x 100%	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial
					1.1.2. Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Jumlah PPKS yang diterminasi / Jumlah PPKS yang tertangani) x 100%	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial
						Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	(Jumlah PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial/ PPKS yang seharusnya tertangani layanan kedaruratan sosial) x 100%	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
					1.1.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	(Jumlah masyarakat miskin penerima perlindungan dan jaminan sosial / Jumlah Masyarakat Miskin yang Seharusnya Menerima Perlindungan dan Jaminan sosial) x 100%	Kepala Bidang Perlimdungan dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan	Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri	(Jumlah KUBE USEP Kategori Mandiri/ Jumlah KUBE USEP yang aktif) x 100%	Kepala Bidang Perlimdungan dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan	(Jumlah pekerja rentan yang menjadi peserta Jamsostek/Jumlah Pekerja Rentan) x 100%	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
					1.1.4. Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang tertangani	(Jumlah Korban Bencana yang tertangani / Jumlah Korban Bencana) x 100%	Kepala Bidang Perlimdungan dan Jaminan Sosial
		1.2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	(Jumlah Penempatan Tenaga Kerja + Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja + Jumlah Magang + Jumlah Penempatan Peserta Pelatihan + Jumlah Penempatan Transmigrasi)/ Jumlah Penganggur	1.2.1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya keberlanjutan peserta transmigrasi	Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan	(Jumlah KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan : Jumlah KK transmigran yang ditempatkan setelah 12 bulan) x 100%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

					1.2.2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	(Jumlah Implementasi Kebijakan dalam PTKD yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja/Jumlah Rekomendasi kebijakan PTKD) x 100%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					1.2.3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal	(Jumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor formal dan non formal setelah 6 bulan paska pelatihan/ Jumlah peserta pelatihan setelah 6 bulan paska pelatihan) x 100%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					1.2.4 Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	(Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online / Jumlah lowongan kerja) x 100%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja	(Jumlah pekerja yang mendapat fasilitas kesejahteraan pekerja/Jumlah pekerja di perusahaan formal)x100%	1.3.1. Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	(Persentase Perusahaan yang melaksanakan SUSU + Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial + Persentase Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi Pekerja + Persentase Perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis sarpras Kesejahteraan Pekerja/ 4) x 100%	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
		1.4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sopsial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat	1.4.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinsosnakertrans	Nilai SAKIP Dinsosnakertrans	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris dinas
							Nilai SPIP Dinsosnakertrans	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Sekretaris dinas
							Nilai IKM Dinsosnakertrans	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretaris dinas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Pengampu
1.1.1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	(Jumlah lembaga PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas/Jumlah keseluruhan lembaga PSKS) x 100%	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial
					Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial
1.1.2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya PPKS yang tertangani di luar panti sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	(Jumlah PPKS yang tertangani/ PPKS yang seharusnya tertangani) x 100%	Kepala Seksi Rehabilitasi sosial	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kotas	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial

					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penelusuran Keluarga Untuk Anak Terlantar	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepla Seksi Rehabilitasi Sosial
					Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Lansia Terlantar sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPSLU Budhi Dharma
					Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam Satu Tahun	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPSLU Budhi Dharma
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Lansia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPSLU Budhi Dharma
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPSLU Budhi Dharma
					Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Lansia Terlantar sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPA Wiloso Projo
					Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam Satu Tahun	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPA Wiloso Projo

					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPA Wiloso Projo
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka UPT RPA Wiloso Projo
1.1.2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS & NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pelayanan bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	(Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani /Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertangani) x 100%	Kepala Seksi Rehabilitasi sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Rehabilitasi sosial
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Rehabilitasi sosial
1.1.2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS & NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana	(Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana : Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang harus terlaksana) x 100%	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial

1.1.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akurasi data sasaran kemiskinan dan termutakhirkannya data PPKS	Persentase akurasi data sasaran kemiskinan	(Jumlah data sasaran kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta - Jumlah aduan data sasaran kemiskinan sesuai ketentuan) : Jumlah data sasaran kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta x 100%	Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Cakupan Daerah Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sosial
		Persentase pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakan	(Jumlah pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakan : Jumlah pemutakhiran data PPKS yang harus dilaksanakan) x 100%	Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sosial				
1.1.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemanfaaatan Bantuan Sosial	Persentase ketepatan kemanfaatan bantuan sosial melalui pendampingan bansos	(Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat pendampingan bantuan sosial/Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat bantuan sosial) x 100%	Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial
1.1.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan dan Monev KUBE USEP	Persentase KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev	(KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev/ KUBE USEP yang seharusnya mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev) X 100%	Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial
1.1.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Persentase penyaluran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota bagi pekerja rentan	(Jumlah pekerja rentan yang mendapatkan penyaluran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta hingga akhir periode / Jumlah Pekerja rentan yang seharusnya difasilitasi bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta) x 100%	Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan

1.1.4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	(Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani / Jumlah kejadian Bencana yang seharusnya tertangani) x 100%	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Dukungan Layanan Psikososial bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial
1.1.4.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	(Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana/ jumlah organisasi sosial masyarakat yang seharusnya melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana) *100	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksankan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial
1.2.1.1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya KK calon transmigran yang memenuhi kriteria penempatan transmigran sesuai kuota penempatan	Persentase KK calon transmigran yang memenuhi kriteria penempatan transmigran sesuai kuota penempatan	(Jumlah KK calon transmigran yang memenuhi kriteria penempatan transmigran / Jumlah KK kuota penempatan) x 100%	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

					Pelatihan Transmigrasi	Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
1.2.2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	(Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun / Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang harus disusun) x 100%	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasipenyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
1.2.3.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan	(Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat pelatihan/ Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan) x 100%	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2.3.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina	(Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina/ Jumlah seluruh Lembaga Pelatihan) x 100%	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2.3.3 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya	((Jumlah Perusahaan yang meningkat produktivitasnya/ Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM)) x 100%	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan dan UKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2.3.4 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan/ Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya	(Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya / Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM) x 100%	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2.4.1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan	(Jumlah peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan/Jumlah penganggur) x 100%	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan

					Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
1.2.4 2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya informasi pasar kerja dan pencari kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	(jumlah pencaker yang ditempatkan/ jumlah pencaker yang terdaftar) x 100 %	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online Karir Hub)	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
					Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
1.2.4.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Purna PMI yang dilatih	(Jumlah PMI Purna yang dilatih/ Jumlah PMI Purna yang terdata) x 100%	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Ketua Tim Kerja Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU)	Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU)	(Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan SUSU / Jumlah Perusahaan) x 100%	Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial	(Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana Hubungan Industrial/ Jumlah Perusahaan) x 100%	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial
					Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial
1.3.1.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaminan Sosial Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja	((Persentase Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi Pekerja + Persentase perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis Fasilitas Kesejahteraan Pekerja) / 2) x 100%	- Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan - Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial

					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Ketua Tim Kerja Hubungan Industrial
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Ketua Tim Kerja Pengupahan dan Kesejahteraan
1.4.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinsosnakertrans	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang wajib disusun	Kerua Tim Kerja PEP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kerua Tim Kerja PEP
		Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinsosnakertrans	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kerua Tim Kerja PEP
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kerua Tim Kerja PEP

					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kerua Tim Kerja PEP
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kerua Tim Kerja PEP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kerua Tim Kerja PEP
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kerua Tim Kerja PEP
1.4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinsosnakertrans oleh BPKAD	Kassubag Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kassubag Keuangan
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Dinas yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Dinas	Kassubag Keuangan
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kassubag Keuangan
1.4.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinsosnakertrans oleh BPKAD	Kasubbag Umum Kepegawaian	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian

					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.4.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinsosnakertrans oleh BPKAD	Kasubbag Umum Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan secara efektif dan efisien	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan secara efektif dan efisien	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara Optimal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinsosnakertrans oleh BPKAD	Kasubbag Umum Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel secara optimal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya secara optimal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian

1.4.1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans	Kasubbag Umum Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara optimal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga secara Optimal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan secara optimal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan secara optimal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara efektif dan efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.4.1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinsosnakertrans	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinsosnakertrans	Hasil nilai IP ASN Dinsosnakertrans	Kasubbag Umum Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.4.1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinsosnakertrans	Jumlah belanja Dinsosnakertrans yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinsosnakertrans dikali 100%	Kasubbag Umum Kepegawaian	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat secara optimal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum Kepegawaian

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengikuti mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategi Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan lima tahunan berdasar dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Penyusunan Rencana Strategis merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala,

Retnaningtyas, S.STP., M.I.P.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197803291997112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DP3AP2KB 5

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 5

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3. Kelompok Sasaran Layanan 14

2.4. Mitra Perangkat Daerah 14

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 17

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 17

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 20

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 22

3.4. Keselarasan Renstra DP3AP2KB dengan Indikator Amanah dari Pusat 23

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 27

4.1. Uraian Program dan Kinerja DP3AP2KB 27

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 54

4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 146

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 153

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 153

BAB V PENUTUP 155

LAMPIRAN 156

Lampiran 1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 157

Lampiran 2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Jabatan 7
Tabel 2.2 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Golongan 8
Tabel 2.3 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Eselon 8
Tabel 2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 9
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025 11
Tabel 2.6 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian IKU dan IKK 11
Tabel 2.7 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Keuangan 13
Tabel 2.8 Isu Strategis DP3AP2KB 15
Tabel 3.1 Visi Misi Daerah 15
Tabel 3.2 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 19
Tabel 3.3 Penahapan Renstra DP3AP2KB 21
Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra 22
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Daerah yang Didukung DP3AP2KB 23
Tabel 3.6 Indikator Bangga Kencana dari Kemendukbangga 26
Tabel 3.7 Indikator Kinerja dari Kemendagri 26
Tabel 3.8 Indikator dari RIBK 2025-2029 26
Tabel 4.1 Program DP3AP2KB 28
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DP3AP2KB 34
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 55
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 146
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB 153
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah. Renstra merupakan instrumen perencanaan strategis yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Renstra ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan jangka menengah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan senyampang dengan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara simultan dan terkoordinir.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang Perangkat Daerah dipastikan terukur, sisetmatis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, juga mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

DP3AP2KB Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyusunan Renstra 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Adapun Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307) mengganti UU No 16 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakara Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra DP3AP2KB kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh DP3AP2KB kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan renstra DP3AP2KB kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DP3AP2KB dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan, dan subkegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DP3AP2KB kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat daftar regulasi sebagai dasar hukum penyusunan Renstra yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen masing-masing Bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerahg, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok Sasaran Layanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Menjelaskan mengenai tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Menjelaskan sasaran disusunnya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Menjelaskan langkah-langkah strategi DP3AP2KB dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator. Di samping itu memuat uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DP3AP2KB

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

DP3AP2KB Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan untuk DP3AP2KB adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DP3AP2KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi DP3AP2KB kota Yogyakarta digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB

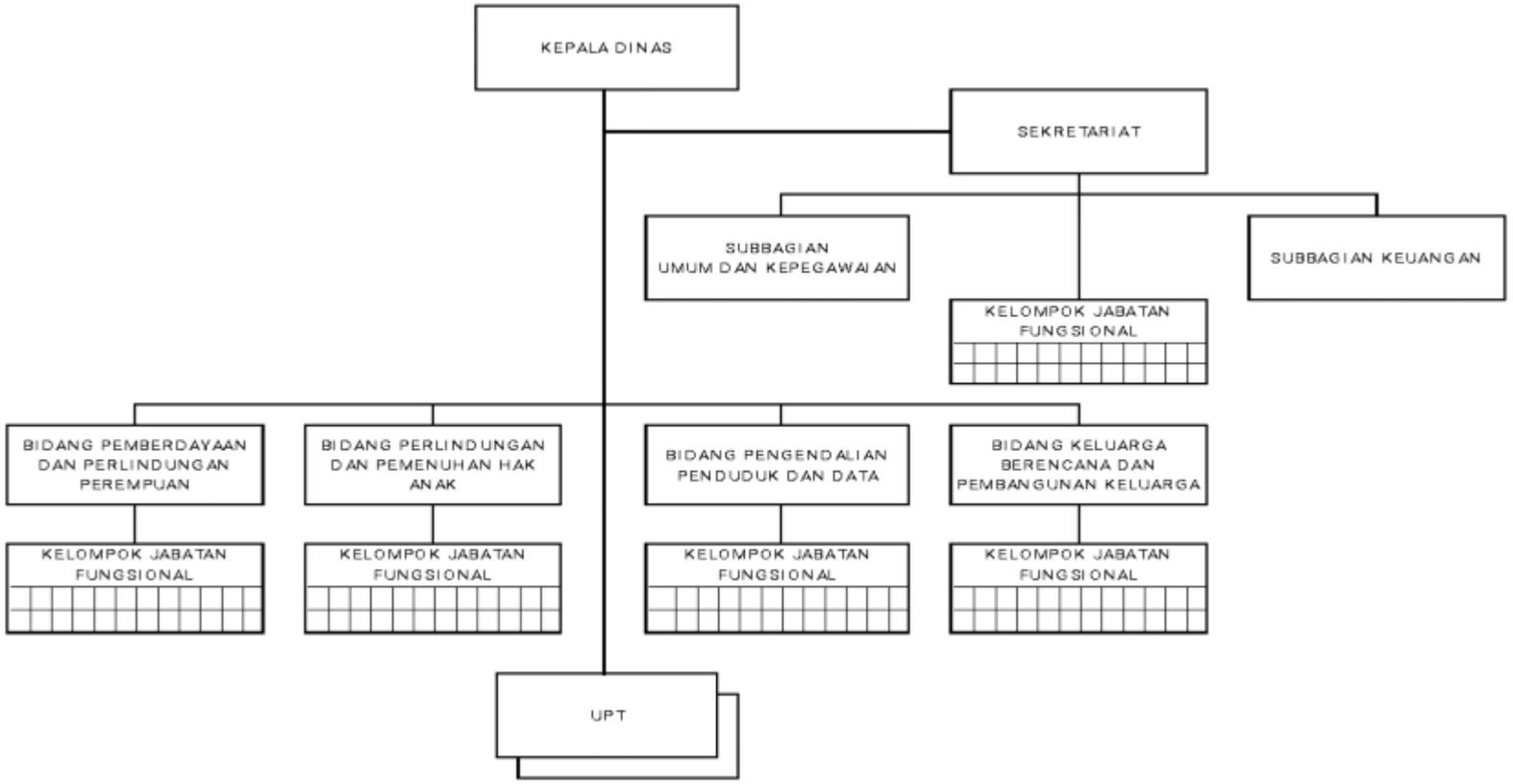

Sumber: Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023.

2.1.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

DP3AP2KB didukung oleh 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun dukungan SDM DP3AP2KB pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang Ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
A.	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	0	1
2	Sekretaris	1	S1	1	S2	1	0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1	S1	1	D4/S1	0	1
4	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1	S1	1	S3	0	1
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data	1	S1	-	-	0	0
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	S1	1	S1	0	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1 Ekonomi	1	S1 Geografi	0	1
9	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	1	S1	1	S2	0	1
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	1	D3	1	S1	0	1
B.	Jabatan Fungsional						
1	Perencana-Ahli Muda	1	S1	1	S1	0	1
2	Analis Kebijakan Ahli Muda	8	S1	2	S2	0	2
3	Psikolog Klinis Ahli Pertama	3	S1 Psikologi	1	S1 Psikologi	0	1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2	S1	2	S1	0	2
5	Perencana Ahli Pertama	1	S1	1	S1	1	0
6	Arsiparis Terampil	1	D3	1	D3	0	1
7	Penata Laksana Barang Terampil	1	D3	1	D3	1	0
8	Pranata Komputer Terampil	1	D3	1	D3	1	0
9	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	S1	0	-	0	0

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang Ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
10	Analis Hukum Ahli Pertama	1	S1 Hukum	0	-	0	0
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif						
1	Penelaah Teknis Kebijakan	12	S1	1	D3	1	0
				5	S1	1	4
2	Pengadministrasi Perkantoran	7	SLTA	3	SLTA	1	2
3	Pengolah Data dan Informasi	6	D3	1	D3	0	1
				1	S1	0	1
4	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	S1	4	S1	0	4
Jumlah		69		34		8	26

Sumber: Simpeg JSS, diolah, Agustus 2025.

Kondisi SDM pada DP3AP2KB belum memadai, karena berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 241 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Daerah, DP3AP2KB dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 69 pegawai, namun baru terisi sebanyak 34 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 32 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 3 pegawai. Sedangkan untuk Diploma 3 (D3) sebanyak 5 pegawai, Strata Satu (S1) sebanyak 20 pegawai, Strata 2 (S2) atau pasca sarjana sebanyak 5 pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Strata 3 (S3) yaitu 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan total SDM antara laki-laki dan perempuan adalah 1 : 3,25, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang atau 23,53% dari jumlah pegawai dan pegawai perempuan sebanyak 26 orang atau 76,47% dari jumlah pegawai. Sedangkan untuk keadaan pegawai berdasarkan golongan dan eselon tampak pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	24
3	II	5
Jumlah		34

Sumber: Simpeg JSS, diolah, Agustus 2025.

Tabel 2.3 Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	4
4	IV	4
Jumlah		**9**

Sumber: Simpeg JSS, diolah, Agustus 2025.

Sesuai dengan hasil Analisis Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi DP3AP2KB jumlah pegawai yang ideal, yaitu sebanyak 69 orang yang terdiri 10 pejabat struktural, 20 pejabat fungsional tertentu, dan 39 pejabat pelaksana. Dengan demikian, sampai bulan Agustus tahun 2025 DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, DP3AP2KB berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Jasa Lain Orang Perseorangan dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi ketugasan DP3AP2KB.

2.1.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain dukungan SDM, DP3AP2KB juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran DP3AP2KB Kota Yogyakarta dirasa belum memadai dengan jumlah pegawai 34 orang ASN, 46 Jasa Lain Orang Perseorangan, serta 29 PKB (18 ASN, 11 P3K). Di samping itu, fasilitas ruang rapat yang dimiliki DP3AP2KB juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh sekretariat maupun bidang-bidang sesuai dengan tata kala perencanaan sering bersamaan. Data sarana dan prasarana DP3AP2KB Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah
1	Pompa Air	1
2	Mobil	10
3	Sepeda motor	50
4	Gerobak Dorong	1
5	Sepeda	2
6	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	2
7	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	3
8	Lemari Penyimpan	2
9	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	10
10	Lemari Besi/Metal	31
11	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	10
12	Lemari Besi/Metal	31
13	Lemari Kayu	46
14	Rak besi	23
15	Rak kayu	34
16	Filling Cabinet	46
17	Filing Cabinet Kayu	1
18	Brangkas	1
19	Lemari sorok	5
20	Lemari kaca	12
21	Lemari makan	2
22	CCTV	2
23	Papan Visual/Papan Nama	167
24	White Board	10
25	Laser Pointer	7
26	LCD Projector/Infocus	35
27	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
28	Papan nama Instansi	1
29	Meubelair	8
30	Meja kerja kayu	22
31	Kursi Besi/Metal	7
32	Kursi Kayu	27

No	Nama	Jumlah
70	Wireless	14
71	Megaphone	2
72	Microphone	3
73	Microphone Table Stand	1
74	Unit Power Supply/UPS	18
75	Camera Video	1
76	Lambang Garuda Pancasila	1
77	Tiang Bendera	1
78	Tangga Aluminium	7
79	Dispenser	10
80	Handy Cam	3
81	Karpet	1
82	Vertikal Blind	2
83	Jemuran	2
84	Alat Pemadam/Portable	14
85	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
86	Meja Rapat Pejabat Eselon II	7
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5
89	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2
90	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
91	Buffet Kayu	3
92	PERALATAN STUDIO AUDIO	1
93	Audio Mixing Stationer	1
94	Microphone/Wireless MIC	1
95	Microphone Cable	4
96	Voice Recorder	3
97	Tripod Camera	2
98	Head Set	8
99	Camera Digital	6
100	LCD Monitor	1
101	Camera Conference	10

No	Nama	Jumlah
33	Sice	10
34	Meja Rapat	55
35	Meja Telepon	6
36	Meja Resepsionis	1
37	Meja Tambahan	23
38	Meja Panjang	9
39	Meja Bundar	2
40	Meja Periksa Pasien	1
41	Meja Bayi	1
42	Meja 1/2 Biro	91
43	Kasur/Spring Bed	6
44	Meja Makan Kayu	10
45	Kursi Rapat	214
46	Kursi Tamu	2
47	Kursi Putar	45
48	Kursi Biasa	12
49	Bangku tunggu	1
50	Kursi Lipat	160
51	Meja komputer	1
52	Sofa	10
53	Jam Elektronik	12
54	Control Clock	7
55	Mesin Cuci	2
56	Tempat Sampah	5
57	Alat pendingin	1
58	Lemari Es	10
59	A.C. Window	1
60	A.C. Split	50
61	Kipas Angin	36
62	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
63	Tabung Gas	2
64	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	11
65	Televisi	7
66	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
67	Amplifier	1
68	Sound System	4
69	Laser Disc	1

No	Nama	Jumlah
102	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3
103	Telephone Mobile	2
104	Handy Talky (HT)	3
105	Utility Trolly	2
106	Gynecological Examining Table	2
107	Vacum Ectrator (AB)	2
108	Exhaust Fan	5
109	Sprayer	1
110	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RA	6
111	Alat Peraga Edukatif (APE) Arena Permainan Anak	2
112	P.C Unit	79
113	Note Book	48
114	Tablet PC	13
115	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5
116	Speaker Komputer	11
117	Monitor	4
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51
119	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
120	Router	1
121	Switch Hub	2
122	Modem	1
123	Acces Point	2
124	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	6
125	Genset	1
126	Miniatur	4
127	Pallet	17
128	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1
129	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7
130	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1
131	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	14
132	BUKU UMUM	340
133	Monograf	57
134	Referensi	34
135	Ilmu Pengetahuan Umum	10
136	Buku Laporan Penelitian	1
137	Piala	3

Sumber: Aplikasi Simbada, Juni 2025.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DP3AP2KB didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, DP3AP2KB mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 50 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 10 unit. Dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 34 orang pegawai, 46 tenaga jasa lain orang perseorangan, dan 29 PKB yang tersebar di 5 (lima) gedung yaitu Gedung Utama DP3AP2KB, Gedung PKK, Gedung Depokan (UPT PPA), Gedung TPA Praba Dharma, dan Gedung TPA Beringharjo. Jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari Sekretariat maupun dari masing-masing bidang.

2.1.4. Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi DP3AP2KB pada Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada anggaran murni Tahun 2025, DP3AP2KB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 22.363.000.890 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 5.971.696.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp 11.550.804.890, dan belanja modal Rp 4.840.500.000. Belanja operasi yang terdiri dari barang dan jasa dan modal yang berasal dari APBD murni sebesar Rp 7.728.739.890 dan DAK sebesar Rp 8.662.565.000. Sedangkan pada Pergeseran ke-3 anggaran tahun 2025, DP3AP2KB melakukan efisiensi sebesar Rp 477.741.544, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp 21.885.259.346; dengan rincian belanja pegawai Rp 5.971.696.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp 10.882.288.346 serta belanja modal sebesar Rp 5.031.275.000 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukungnya. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 8 program, 27 kegiatan, dan 87 sub kegiatan.

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Murni 2025		Pergeseran ke-3 2025	
		Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Belanja Pegawai	5.971.696.000	26,70	5.971.696.000	27,29
2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.804.890	51,65	10.882.288.346	49,72
3	Belanja Modal	4.840.500.000	21,65	5.031.276.000	22,99
Jumlah Anggaran		**22.363.000.890**	**100,00**	**21.885.259.346**	**100,00**

Sumber: DPA DP3AP2KB, 2025.

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami perubahan indikator kinerja utama, yaitu pada Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026, serta perubahan indikator kinerja program pada kedua masa Renstra tersebut. Evaluasi kinerja dimulai tahun 2021 sebagaimana DP3AP2KB mulai terbentuk pada tahun tersebut. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir dalam rentang pertengahan Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keberdayaan perempuan	-	-	-	19,95%	-	-	-	21,70%
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	-	-	-	1,02 - 2	-	-	-	1,16
3	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	-	-	-	0,82 - 2	-	-	-	1,01
4	*CBR (Crude Birth Rate)*	11-10 CBR	11-10 CBR	10-9 CBR	5-8 CBR	6,53 CBR	6,03 CBR	5,87 CBR	5,17 CBR
5	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2021-2024 yang ditunjukkan pada tabel 2.7, sebagaimana diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2021 mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan baik target keuangan beserta realisasinya tertuang pada matriks berikut:

Tabel 2.7 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Keuangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				CAPAIAN KEUANGAN (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	802.883.976,00	795.764.403,00	963.131.049,00	799.092.765,00	764.780.526,64	764.250.511,24	925.613.740,00	795.211.750,00	95,25 %	96,04%	96,10 %	99,51 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.146.517.951,00	809.489.886,00	785.915.500,00	799.605.600,00	827.660.389,68	750.595.052,32	766.113.548,00	787.556.075,00	72,19 %	92,72%	97,48 %	98,49 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	247.305.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	245.229.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	99,16 %	94,30%	-	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.040.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	8.039.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	99,99 %	100,00 %	-	-
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.253.998.861,00	1.410.644.675,00	1.534.973.750,00	1.661.460.500,00	1.245.305.478,04	1.403.925.538,32	1.529.451.050,00	1.660.996.635,00	99,31 %	99,52%	99,64 %	99,97 %
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	849.129.990,00	1.204.109.714,00	1.041.518.000,00	1.034.798.695,00	837.390.590,00	1.172.368.027,00	1.004.967.124,00	1.023.327.333,00	98,62 %	97,36%	96,49 %	98,89 %
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.370.989.627,00	9.147.294.908,00	8.398.075.706,00	7.756.635.416,00	6.947.288.914,00	8.447.669.601,35	7.969.792.473,00	7.112.182.733,00	94,25 %	92,35%	94,90 %	91,69 %
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	274.305.900,00	379.235.110,00	414.628.168,00	431.955.645,00	268.297.760,00	377.866.700,00	412.594.123,00	423.446.750,00	97,81 %	99,64%	99,51 %	98,03 %
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.288.748.780,00	1.961.694.440,00	2.750.904.000,00	3.785.916.000,00	2.509.896.933,00	1.830.183.418,00	2.461.131.426,00	3.652.436.929,00	76,32 %	93,30%	89,47 %	96,47 %
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.122.638.340,00	2.158.409.120,00	1.743.590.750,00	3.086.045.200,00	1.064.008.140,00	2.111.736.140,00	1.729.250.750,00	2.698.563.590,00	94,78 %	97,84%	99,18 %	87,44 %
	TOTAL	16.364.558.425,00	17.870.227.256,00	17.632.736.923,00	19.355.509.821,00	14.717.896.731,36	16.862.044.088,23	16.798.914.234,00	18.153.721.795,00	89,94 %	94,36%	95,27 %	93,79 %

Sumber: Fungsional, DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

Dari tabel 2.7. di atas, terlihat bahwa capaian keuangan DP3AP2KB dari sejak berdirinya, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2024 termasuk tinggi. Capaian keuangan DP3AP2KB Dari awal berdiri, berturut-turut tahun 2021 hingga tahun 2024 yaitu 89,94%; 94,36%; 95,27%; dan 93,79%.

Pencapaian yang tinggi ini dalam kurun waktu empat tahun tersebut didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berKB cukup tinggi, semakin mudahnya akses pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik melalui sistem online maupun jejaring, dan adanya sinergi antar lembaga yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Sedangkan faktor penghambat selama kurun waktu empat tahun tersebut di antaranya adalah kurang optimalnya peran Fapsedu (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dan Kampung KB dalam meningkatkan keluarga berkualitas, usia perkawinan yang semakin tinggi, kondisi pandemi pada tahun 2021-2022 menyebabkan tingginya kasus kekerasan dengan segala macam tekanan yang diterima masyarakat selama masa pandemi, dan semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah pasca pandemi yaitu pada tahun 2023-2024.

2.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran utama layanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah 5 kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, difabel, dan orang miskin), Keluarga, kelompok sasaran program stunting yang terdiri dari Catin (Calon Pengantin), Ibu Hamil, Ibu Nifas/Menyusui, dan Baduta (Bayi dengan usia di bawah dua tahun) serta 48 Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta. Bentuk layanan mengacu pada tugas DP3AP2KB yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Dalam menjalankan pelayanannya DP3AP2KB Kota Yogyakarta fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok rentan ini melalui berbagai program dan layanan yang responsif gender dan inklusif untuk tercapainya ketahanan keluarga.

2.4. Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsinya DP3AP2KB Kota Yogyakarta bermitra dengan instansi internal dan eksternal di Pemerintah Kota Yogyakarta. Instansi internal adalah Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan Badan Usaha di Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan instansi eksternal meliputi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Akademisi.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat yang diuraikan pada subbab 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada dua alinea terakhir, maka permasalahan yang dihadapi DP3AP2KB dalam rangka meningkatkan kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, adalah:

1. Kurangnya kapasitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak,
2. Kurangnya integrasi pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kurikulum sekolah,
3. Masih rendahnya responsibilitas terhadap dinamika masalah sosial baru (kekerasan siber, eksploitasi online, dan sebagainya),
4. Tren penurunan angka kelahiran,
5. Belum terwujudnya ketahanan keluarga yang ideal, dan
6. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor.

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis DP3AP2KB di masa yang akan datang sebagaimana terlihat pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Isu Strategis DP3AP2KB

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
		Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	1. Kurangnya kapasitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, 2. Kurangnya integrasi pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kurikulum sekolah, 3. Masih rendahnya responsibilitas terhadap dinamika masalah sosial baru (kekerasan siber, eksploitasi online, dan sebagainya), 4. Tren penurunan angka kelahiran, 5. Belum terwujudnya ketahanan keluarga yang ideal, dan 6. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor.	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi (pilar sosial)	1. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 2. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	1. Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan 2. Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional	1. Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk 3. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam menyusun Renstra OPD, DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendasarkan pada visi dan misi daerah yang tertuang pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah seperti pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

VISI DAERAH	MISI DAERAH	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH
Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan, 2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari, 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal, 4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945 5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
			2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	3. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
			4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
			5. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
			6. Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman, dan tertib
		3. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendukung tujuan daerah kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan;
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY.

DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendukung tujuan 1 dan 2 sebagai OPD utama.

Tujuan daerah Kota Yogyakarta kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Daerah yang terdiri dari 7 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
4. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

5. Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup Yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana;
6. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib;
7. Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-2 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan sasaran ke-4 yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat. Selain sasaran 2 dan 4, DP3AP2KB juga mendukung dua sasaran yang lain yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat; dan
2. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta serta memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran serta isu strategis yang terpetakan serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.08.2.14.2.22.01.0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; - Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	99.25	99.25	99.25	99.27	99.27	99.29	99.29	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)	64.91	64.91	64.93	64.95	64.97	65.00	65.03	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)	71.86	71.86	71.86	71.86	71.86	71.89	71.89	
			Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat)	Utama	Utama	Utama	Paripurna*)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
		Terkendalinya angka kelahiran melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Total Fertility Rate (TFR) (Nilai)	1.65	1.53-1.65	1.53-1.65	1.55-1.67	1.55-1.67	1.57-1.69	1.57-1.69	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Nilai)	A (89,992)	A (89,992 - 90,00)	A (89,992 - 90,00)	A (89,992 - 90,00)	A (89,992 - 90,00)	A (89,992 - 90,00)	A (89,992 - 90,00)	

Sumber: SIPD RI, 2025

Keterangan: *) yang dimaksud Paripurna adalah predikat tertinggi ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak, atau sering disebut dengan predikat KLA.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan sasaran perangkat daerah Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, Terkendalinya angka kelahiran melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, dan Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang Baik dan Adaptif, DP3AP2KB selama 5 tahun ke depan akan berupaya melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya adalah:

1. Penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi;
3. Pengembangan layanan terintegrasi;
4. Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan;
5. Penguatan kepemimpinan dan partisipasi politik;
6. Optimalisasi Program Keluarga Berkualitas;
7. Inovasi Layanan KB;
8. Penguatan KKB (Kampung Keluarga Berkualitas);
9. Penguatan Ketahanan Keluarga;
10. Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra DP3AP2KB

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendampingan Puspagatra Ngetren di 14 Kemantren	Pengembangan Puspagatra Ngetren di 14 Kemantren	Kampanye secara masif tentang layanan Puspagatra Ngetren	Penguatan Kapasitas Konselor Puspagatra Ngetren	Peningkatan layanan Puspagatra Ngetren
Diseminasi lapor kekerasan di sekolah	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Lapor Kekerasan di JSS	penguatan kapasitas konselor dan kader penanganan kekerasan	Reviu aplikasi lapor kekerasan	Pengembangan aplikasi lapor kekerasan
Penyusunan kurikulum dan modul Koper Kota	pengembangan kelas koper kota dengan sasaran pasangan menikah dibawah umur dan pasangan usia subur	penguatan kapasitas diri & keluarga (*soft skill*, literasi keuangan, kesadaran gender, kesehatan)	Pendampingan menuju kemandirian ekonomi	Fasilitasi Pemasaran dan Permodalan usaha
Inisiasi Forum Ketahanan Keluarga tingkat kota dan kewilayahan	Peningkatan kapasitas forum ketahanan keluarga	Digitalisasi pelaporan layanan ketahanan keluarga	Pematangan Menu Utama Aplikasi Pelaporan layanan ketahanan keluarga	Pengembangan Aplikasi Pelaporan layanan ketahanan keluarga
Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan	Penambahan sasaran Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SMP	Penambahan sasaran Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SD	Penambahan sasaran Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SD	Pendampingan Sekolah Siaga Kependudukan

Sumber: DP3AP2KB, 2025

Dari penahapan Renstra pada tabel 3.3. di atas, DP3AP2KB menunjukkan bahwa memiliki penahapan selama 5 tahun ke depan dalam penyelesaikan isu strategis yang ada yaitu dengan kegiatan: Puspagatra Ngetren, Aplikasi Lapor Kekerasan, Koper Kota (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta), Optimalisasi Forum Ketahanan Keluarga, dan Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan strategi serta arah kebijakan yang dipilih sebagai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan: Meningkatnya Keluarga Berkualitas Regulasi Nasional: Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Permen PPPA No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat sinergi program keluarga berkualitas dengan pemberdayaan perempuan	Peningkatan keluarga yang berkualitas melalui implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, melalui: 1. Meningkatkan keberdayaan perempuan; 2. Meningkatkan pemenuhan hak anak; 3. Meningkatkan perlindungan khusus anak; 4. Mengendalikan kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup berupa daya dukung maupun daya tampung lingkungan; dan		
2	Sasaran 1: Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Regulasi nasional: 1. UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak 3. Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional		1. Penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat; 2. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi; 3. Pengembangan layanan terintegrasi; 4. Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan; 5. Penguatan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan; 6. Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan bersama.	
3	Sasaran 2: Terkendalinya angka kelahiran melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Regulasi: 1. UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga		1. Optimalisasi Program Keluarga Berkualitas; 2. Inovasi Layanan KB; 3. Penguatan KKB (Kampung Keluarga Berkualitas); 4. Penguatan Ketahanan Keluarga; 5. Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan bersama.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 3. Peraturan BKKBN No. 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga	5. Meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.		
4	Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang Baik dan Adaptif		1. Mengevaluai SOP yang sudah ada dan menyusun SOP baru yang bersifat layanan baik layanan kepada masyarakat maupun layanan internal. 2. Memperkuat monitoring dan evaluasi internal dalam rangka pencapaian peningkatan tata kelola DP3AP2KB secara menyeluruh	

Sumber: DP3AP2KB, 2025.

3.4. Keselarasan Renstra DP3AP2KB dengan Indikator Amanah dari Pusat

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai perencanaan 5 tahunan harus selaras dengan perencanaan daerah maupun perencanaan pusat. Keselarasan Renstra DP3AP2KB terhadap indikator daerah ditunjukkan melalui dukungan DP3AP2KB terhadap indikator kinerja daerah seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Daerah yang Didukung DP3AP2KB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,91	64,91	64,93	64,95	64,97	65	65,03	
2	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	70,88	70,95	70,96	71,05	71,06	71,07	71,08	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	99,25	99,25	99,25	99,27	99,27	99,29	99,29	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	167	167	167	167	0,17	0,17	172	
II.	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio	1,65	1.53-1.65	1.53-1.65	1.55-1.67	1.55-1.67	1.57-1.69	1.57-1.69	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000	Rasio	51,61	46,46	48,3	50,09	51,85	53,57	55,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	penduduk perempuan)									
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	40,41	50,01	50,04	50,06	50,08	50,11	50,13	
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	62,60	62,61	62,62	62,63	62,64	62,65	62,66	
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	12,55	12,54	12,53	12,52	12,51	12,5	12,5	

Sumber: SIPD, 2025.

Sedangkan keselarasan Renstra DP3APKB Kota Yogyakarta dengan indikator amanah dari pusat bisa dilihat dari indikator dari Kemendukbangga, Indikator Kinerja Kemendagri, dan Indikator yang ada di rencana induk Bidang Kesehatan.

3.4.1. Indikator dari Kemendukbangga

Sebagai dinas yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi pelaksana kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kemendukbangga, salah satunya adalah program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Keselarasan Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta dengan indikator Bangga Kencana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Indikator Bangga Kencana dari Kemendukbangga

No	Indikator	Terdapat di Dokumen Perencanaan (RPJMD/Renstra /Lainnya)	Data Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	**Total Fertility Rate (TFR)**	*Renstra, RPJMD*	*1,65*	*1,53 - 1,65*	*1,53 - 1,65*	*1,55 - 1,67*	*1,55 - 1,67*	*1,57 - 1,69*
2	**Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun**	*Renstra*	9,10	9,5 - 8,7	9,5 - 8,7	9,4 - 8,6	9,4 - 8,6	9,3 - 8,5
3	**Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi**	*Renstra, RPJMD*	62,6	62,61	62,62	62,63	62,64	62,65
4	**Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)**	*Renstra, RPJMD*	64,91	64,91	64,93	64,95	64,97	65,00
5	**Indeks Lansia Berdaya**	*RPJMD*	60,20	60,25	60,30	60,35	60,40	60,45

No	Indikator	Terdapat di Dokumen Perencanaan (RPJMD/Renstra /Lainnya)	Data Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	*RPJMD*	91,40	91,41	91,42	91,43	91,44	91,45
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	*Renstra*	93,33%	93,33%	93,33%	95,56%	95,56%	97,78%
8	Indeks Perlindungan Anak	*RPJMD*	70,88	70,95	70,96	71,05	71,06	71,07

Sumber: DP3AP2KB, 2025.

Berdasarkan data indikator Bangga Kencana di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan PJPK dalam mencapai target pembangunan keluarga berkualitas. Dari 8 indikator Bangga Kencana, 5 indikator telah dimasukkan dalam indikator Renstra DP3AP2KB. Sedangkan 2 indikator yang lain yaitu Indeks Lansia Berdaya dan Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja di samping telah masuk dalam RPJMD telah secara rutin dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang dileburkan dalam program-program DP3AP2KB, misalnya dalam bentuk pembinaan keluarga yang memiliki lansia atau BKL (Bina Keluarga Lansia) dan pembentukan Sekolah Lansia, serta pembinaan keluarga yang memiliki remaja atau BKR (Bina Keluarga Remaja), dan 1 indikator yaitu Indeks Perlindungan Anak telah masuk sebagai Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD 2025-2029 Kota Yogyakarta.

3.4.2. Indikator dari Kemendagri

DP3AP2KB Kota Yogyakarta sebagai dinas daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kemendagri dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terkait urusan tersebut. Oleh karenanya, keselarasan Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta dengan indikator yang ditetapkan Kemendagri menjadi suatu keharusan, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Indikator Kinerja dari Kemendagri

No	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)	Masuk dalam Renstra
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Masuk dalam Renstra
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Masuk dalam Indikator Kinerja Daerah
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Masuk dalam Renstra
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific fertility rate (ASFR 15-19)	Masuk dalam Renstra

No	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Masuk dalam Indikator Kinerja Daerah
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Masuk dalam RPJMD
8	Indeks Lansia Berdaya	Masuk dalam RPJMD
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Masuk dalam Renstra

Sumber: DP3AP2KB, 2025.

Selain 9 indikator di atas, Kemendagri juga mengamanatkan pelaksanaan intervensi PPPS (Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting) di daerah. Sebagai bentuk aksi konvergensi PPPS, DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang menyasar kepada kelompok sasaran calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting yaitu dengan bekerja sama dengan Kemenag dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan materi pencegahan stunting. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan.

3.4.3. Indikator dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Sebagai bentuk penyelarasan Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta terhadap program kesehatan nasional dari Kemenkes, DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah memasukkan beberapa indikator kinerja kesehatan yang termuat dalam RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) 2025-2029 dalam perencanaannya seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Indikator dari RIBK 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029	Pelaksanaan
1	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Masuk dalam Renstra
2	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	Masuk dalam Renstra
3	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Masuk dalam Renstra
4	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	Masuk dalam Renstra

Sumber: DP3AP2KB, 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program dan Kinerja DP3AP2KB

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dimulai dari Sasaran RPJMD yang relevan, tujuan, sasaran, outcome, indikator, Program/Kegiatan/Subkegiatan. Program Perangkat Daerah yang disusun pada Renstra DP3AP2KB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program DP3AP2KB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.747.562.794,00		10.416.633.901,00		10.628.521.738,00		10.898.293.394,00		11.194.570.529,00		11.580.060.040,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.151.956.264,00		6.701.349.701,00		6.837.650.712,00		7.011.203.009,00		7.201.807.085,00		7.449.804.190,00	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Nilai SAKIP DP3AP2KB (Nilai)	A (87,34)	A (87,5 - 90)	8.151.956.264,00	A (88,1 - 90)	6.701.349.701,00	A (88,6 - 90)	6.837.650.712,00	A (89,1 - 90)	7.011.203.009,00	A (89,6 - 90)	7.201.807.085,00	AA (90,1-93,1)	7.449.804.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Nilai SPIP DP3AP2KB (Nilai)	Terkelola dan Terukur (4,40)	Terkelola dan Terukur (4,40)		Terkelola dan Terukur (4,40)		Terkelola dan Terukur (4,40)		Terkelola dan Terukur (4,40)		Terkelola dan Terukur (4,40)		Terkelola dan Terukur (4,40)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
															Perlindungan Anak
	Nilai IKM DP3AP2KB (Nilai)	84.91	84.95-85.00		85.00-85.25		85.25-85.50		85.50-85.75		85.75-86.00		86.00-86.25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				934.780.380,00		1.207.394.400,00		1.231.952.002,00		1.263.221.236,00		1.297.562.720,00		1.342.244.811,00	
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Berdaya (Persentase)	31.30	31.42	934.780.380,00	31.54	1.207.394.400,00	31.67	1.231.952.002,00	31.79	1.263.221.236,00	32.04	1.297.562.720,00	32.29	1.342.244.811,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				6.068.001.750,00		321.600.000,00		328.161.538,00		336.490.888,00		345.638.610,00		357.540.814,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	6.068.001.750,00	100	321.600.000,00	100	328.161.538,00	100	336.490.888,00	100	345.638.610,00	100	357.540.814,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.524.000.200,00		1.303.144.400,00		1.329.649.494,00		1.363.398.471,00		1.400.463.338,00		1.448.688.853,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV (Nilai)	463	468	1.524.000.200,00	473	1.303.144.400,00	478	1.329.649.494,00	483	1.363.398.471,00	488	1.400.463.338,00	493	1.448.688.853,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.068.824.200,00		883.145.400,00		901.107.992,00		923.979.790,00		949.098.776,00		981.781.372,00	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V (Nilai)	195	196	1.068.824.200,00	197	883.145.400,00	198	901.107.992,00	199	923.979.790,00	200	949.098.776,00	201	981.781.372,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
															Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.738.097.480,00		1.626.779.212,00		1.659.866.823,00		1.701.996.331,00		1.748.267.226,00		1.808.469.507,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				377.558.100,00		255.531.300,00		260.728.637,00		267.345.415,00		274.614.400,00		284.070.857,00	
Terkendalinya Jumlah Penduduk	ASFR 15 - 19 Tahun (Nilai)	9.1	9.5-8.7	377.558.100,00	9.5-8.7	255.531.300,00	9.4-8.6	260.728.637,00	9.4-8.6	267.345.415,00	9.3-8.5	274.614.400,00	9.3-8.5	284.070.857,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.791.840.000,00		174.709.000,00		178.262.465,00		182.787.098,00		187.756.283,00		194.221.746,00	
Terlaksananya Program Keluarga Berencana	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB	40.11	40.12	1.791.840.000,00	40.13	174.709.000,00	40.14	178.262.465,00	40.15	182.787.098,00	40.16	187.756.283,00	40.17	194.221.746,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	MKJP) (Persentase)														Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.568.699.380,00		1.196.538.912,00		1.220.875.721,00		1.251.863.818,00		1.285.896.543,00		1.330.176.904,00	
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna (Persentase)	13.58	14.37	2.568.699.380,00	15.37	1.196.538.912,00	16.48	1.220.875.721,00	17.59	1.251.863.818,00	18.82	1.285.896.543,00	20.60	1.330.176.904,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0,00		117.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				0,00		117.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kelurahan)	N/A	N/A	0,00	1	117.900.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
TOTAL KESELURUHAN				22.485.660.274,00		12.161.313.113,00		12.288.388.561,00		12.600.289.725,00		12.942.837.755,00		13.388.529.547,00	

Sumber: SIPD, 2025

Sedangkan Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DP3AP2KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indikator)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)		
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)		
					Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat)		
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kelurahan)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pembinaan sanggar/lembaga budaya	Jumlah Rintisan Desa Budaya yang Perekonomian Perempuannya Dikembangkan	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan kantong Budaya (Laporan)	2.22.08.5.07.0001 - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	
					Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya (Orang)	2.22.08.5.07.0015 - Pengembangan Ekonomi Perempuan	
			Meningkatnya Keberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan Berdaya (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terwujudnya Kesetaraan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif (Persentase)	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Persen)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terfasilitasinya Lembaga Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Persentase)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan (Lembaga)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
				Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatateń/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas (Persentase)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV (Nilai)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Jumlah Lembaga Ramah Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak (Persentase)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak (Persentase)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak		Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V (Nilai)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas SDM Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi (Persentase)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
		Terkendalinya angka kelahiran melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga			Total Fertility Rate (TFR) (Nilai)		
			Terkendalinya Jumlah Penduduk		ASFR 15 - 19 Tahun (Nilai)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pemahaman tentang Kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota	Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan (Persentase)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Dokumen)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Meningkatnya pemanfaatan data informasi keluarga untuk pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA (Persentase)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Terlaksananya Program Keluarga Berencana		Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Menurunnya Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Meningkatnya Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (Persentase)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (Persentase)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Meningkatnya Peran Serta Kampung KB dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Ketahanan Keluarga		Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna (Persentase)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) (Persentase)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Orang)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (Laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana		Nilai SAKIP DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP DP3AP2KB (Nilai)		
					Nilai IKM DP3AP2KB (Nilai)		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DP3AP2KB	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB (Persentase)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KB (Persentase)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset (Nilai)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DP3AP2KB	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB (Persentase)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD, 2025.

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta telah dirumuskannya Program, Kegiatan, dan Subkegiatan maka perlu direncanakan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun ke depan. Adapun rincian pendanaan terlampir pada matrik berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.747.562.794,00		10.416.653.901,00		10.628.521.738,00		10.898.293.394,00		11.194.570.529,00		11.580.060.040,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.151.956.264,00		6.701.349.701,00		6.837.650.712,00		7.011.203.009,00		7.201.807.085,00		7.449.804.190,00		
	Nilai IKM DP3AP2KB (Nilai)	84.91	84,95 - 85,00		85.00 - 85.25		85.25 - 85.50		85.50 - 85.75		85.75 - 86.00		86.00 - 86.25		2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Nilai SAKIP DP3AP2KB (Nilai)	A (87,34)	A (87,5 - 90)	8.151.956.264,00	A (88,1 - 90)	6.701.349.701,00	A (88,6 - 90)	6.837.650.712,00	A (89,1 - 90)	7.011.203.009,00	A (89,6 - 90)	7.201.807.085,00	AA (90,1-93,1)	7.449.804.190,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
	Nilai SPIP DP3AP2KB (Nilai)	Terkelola dan Terukur (4,40)	Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)		Terkelola dan Terukur (4,40 - 4,49)			
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.832.800,00		37.376.000,00		40.819.000,00		41.824.000,00		42.928.000,00		44.354.200,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DP3AP2KB	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB (Persen)	100	100	42.832.800,00	100	37.376.000,00	100	40.819.000,00	100	41.824.000,00	100	42.928.000,00	100	44.354.200,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KB (Persen)	100	100		100		100		100		100		100			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.235.000,00		6.810.000,00		9.645.500,00		9.880.000,00		10.140.000,00		10.477.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	9.235.000,00	3	6.810.000,00	3	9.645.500,00	3	9.880.000,00	3	10.140.000,00	3	10.477.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.461.800,00		3.630.000,00		3.702.000,00		3.793.000,00		3.893.500,00		4.023.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.461.800,00	1	3.630.000,00	1	3.702.000,00	1	3.793.000,00	1	3.893.500,00	1	4.023.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.905.000,00		3.630.000,00		3.702.000,00		3.793.000,00		3.893.500,00		4.023.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.905.000,00	1	3.630.000,00	1	3.702.000,00	1	3.793.000,00	1	3.893.500,00	1	4.023.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.954.500,00		4.729.500,00		4.823.600,00		4.943.000,00		5.073.000,00		5.241.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.954.500,00	1	4.729.500,00	1	4.823.600,00	1	4.943.000,00	1	5.073.000,00	1	5.241.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				8.714.000,00		7.789.000,00		7.944.000,00		8.141.000,00		8.356.000,00		8.634.200,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	8.714.000,00	1	7.789.000,00	1	7.944.000,00	1	8.141.000,00	1	8.356.000,00	1	8.634.200,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				8.613.000,00		7.738.000,00		7.891.900,00		8.087.000,00		8.301.000,00		8.577.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15	15	8.613.000,00	15	7.738.000,00	15	7.891.900,00	15	8.087.000,00	15	8.301.000,00	15	8.577.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.949.500,00		3.049.500,00		3.110.000,00		3.187.000,00		3.271.000,00		3.379.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	3.949.500,00	7	3.049.500,00	7	3.110.000,00	7	3.187.000,00	7	3.271.000,00	7	3.379.000,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.163.664.600,00		5.290.045.600,00		5.395.425.049,00		5.532.937.178,00		5.683.653.323,00		5.880.066.555,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	5	5	6.163.664.600,00	5	5.290.045.600,00	5	5.395.425.049,00	5	5.532.937.178,00	5	5.683.653.323,00	5	5.880.066.555,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.134.135.000,00		5.264.677.800,00		5.369.549.893,00		5.506.415.143,00		5.656.415.194,00		5.851.902.329,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	36	38	6.134.135.000,00	35	5.264.677.800,00	35	5.369.549.893,00	35	5.506.415.143,00	35	5.656.415.194,00	35	5.851.902.329,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				23.954.500,00		20.483.700,00		20.893.374,00		21.415.708,00		21.993.932,00		22.741.726,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	23.954.500,00	12	20.483.700,00	12	20.893.374,00	12	21.415.708,00	12	21.993.932,00	12	22.741.726,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				572.100,00		572.100,00		583.542,00		598.131,00		614.280,00		635.166,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		572.100,00	12	572.100,00	12	583.542,00	12	598.131,00	12	614.280,00	12	635.166,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.196.000,00		550.000,00		561.000,00		575.025,00		590.551,00		610.629,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	1	1.196.000,00	1	550.000,00	1	561.000,00	1	575.025,00	1	590.551,00	1	610.629,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)														Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				671.000,00		660.000,00		673.200,00		690.030,00		708.661,00		732.755,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3	671.000,00	3	660.000,00	3	673.200,00	3	690.030,00	3	708.661,00	3	732.755,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.784.000,00		2.750.000,00		2.805.000,00		2.875.125,00		2.952.753,00		3.053.147,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	2.784.000,00	14	2.750.000,00	14	2.805.000,00	14	2.875.125,00	14	2.952.753,00	14	3.053.147,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				352.000,00		352.000,00		359.040,00		368.016,00		377.952,00		390.803,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	352.000,00	2	352.000,00	2	359.040,00	2	368.016,00	2	377.952,00	2	390.803,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.742.000,00		4.169.000,00		4.252.380,00		4.358.690,00		4.476.375,00		4.628.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset (Nilai)	5	5	5.742.000,00	5	4.169.000,00	5	4.252.380,00	5	4.358.690,00	5	4.476.375,00	5	4.628.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.020.000,00		825.000,00		841.500,00		862.538,00		885.826,00		915.944,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.020.000,00	2	825.000,00	2	841.500,00	2	862.538,00	2	885.826,00	2	915.944,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				690.000,00		528.000,00		538.560,00		552.024,00		566.929,00		586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	690.000,00	1	528.000,00	1	538.560,00	1	552.024,00	1	566.929,00	1	586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0003 - Koordinasi dan				1.020.000,00		660.000,00		673.200,00		690.030,00		708.661,00		732.755,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	1.020.000,00	2	660.000,00	2	673.200,00	2	690.030,00	2	708.661,00	2	732.755,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.380.000,00		1.100.000,00		1.122.000,00		1.150.050,00		1.181.101,00		1.221.259,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1.380.000,00	12	1.100.000,00	12	1.122.000,00	12	1.150.050,00	12	1.181.101,00	12	1.221.259,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				816.000,00		528.000,00		538.560,00		552.024,00		566.929,00		586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	816.000,00	1	528.000,00	1	538.560,00	1	552.024,00	1	566.929,00	1	586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				816.000,00		528.000,00		538.560,00		552.024,00		566.929,00		586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	816.000,00	1	528.000,00	1	538.560,00	1	552.024,00	1	566.929,00	1	586.204,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.974.000,00		5.390.000,00		5.497.800,00		5.635.245,00		5.787.397,00		5.984.168,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DP3AP2KB	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DP3AP2KB (Dokumen)	84,82	84,82	9.974.000,00	84,83	5.390.000,00	84,84	5.497.800,00	84,85	5.635.245,00	84,86	5.787.397,00	84,87	5.984.168,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				9.974.000,00		5.390.000,00		5.497.800,00		5.635.245,00		5.787.397,00		5.984.168,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	9.974.000,00	2	5.390.000,00	2	5.497.800,00	2	5.635.245,00	2	5.787.397,00	2	5.984.168,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				464.788.983,00		101.141.930,00		103.164.769,00		105.743.889,00		108.598.973,00		112.291.339,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip	86,57	86,57	464.788.983,00	86,59	101.141.930,00	86,60	103.164.769,00	86,61	105.743.889,00	86,62	108.598.973,00	86,63	112.291.339,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
	Administrasi Umum DP3AP2KB (Nilai)														Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.245.900,00		7.714.000,00		7.868.280,00		8.064.987,00		8.282.742,00		8.564.355,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.245.900,00	1	7.714.000,00	1	7.868.280,00	1	8.064.987,00	1	8.282.742,00	1	8.564.355,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				376.606.383,00		41.031.930,00		41.852.569,00		42.898.883,00		44.057.153,00		45.555.096,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	376.606.383,00	1	41.031.930,00	1	41.852.569,00	1	42.898.883,00	1	44.057.153,00	1	45.555.096,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.070.000,00		4.305.000,00		4.391.100,00		4.500.878,00		4.622.401,00		4.779.563,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	4.070.000,00	1	4.305.000,00	1	4.391.100,00	1	4.500.878,00	1	4.622.401,00	1	4.779.563,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.016.700,00		14.236.000,00		14.520.720,00		14.883.738,00		15.285.599,00		15.805.309,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	22.016.700,00	1	14.236.000,00	1	14.520.720,00	1	14.883.738,00	1	15.285.599,00	1	15.805.309,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				780.000,00		780.000,00		795.600,00		815.490,00		837.508,00		865.984,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	780.000,00	1	780.000,00	1	795.600,00	1	815.490,00	1	837.508,00	1	865.984,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.070.000,00		33.075.000,00		33.736.500,00		34.579.913,00		35.513.570,00		36.721.032,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	52.070.000,00	1	33.075.000,00	1	33.736.500,00	1	34.579.913,00	1	35.513.570,00	1	36.721.032,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah				0,00		34.664.750,00		35.358.045,00		36.241.996,00		37.220.530,00		38.486.028,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	Kegiatan baru ada

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	di Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	5	-	0,00	5	34.664.750,00	5	35.358.045,00	5	36.241.996,00	5	37.220.530,00	5	38.486.028,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		34.664.750,00		35.358.045,00		36.241.996,00		37.220.530,00		38.486.028,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0,00	1	34.664.750,00	1	35.358.045,00	1	36.241.996,00	1	37.220.530,00	1	38.486.028,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				655.839.904,00		670.081.964,00		683.483.603,00		700.570.693,00		719.486.103,00		743.948.629,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB (Persen)	100	100	655.839.904,00	100	670.081.964,00	100	683.483.603,00	100	700.570.693,00	100	719.486.103,00	100	743.948.629,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000,00		1.500.000,00		1.530.000,00		1.568.250,00		1.610.593,00		1.665.353,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.250.000,00	1	1.500.000,00	1	1.530.000,00	1	1.568.250,00	1	1.610.593,00	1	1.665.353,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				11.856.000,00		11.335.964,00		11.562.683,00		11.851.750,00		12.171.748,00		12.585.587,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	11.856.000,00	1	11.335.964,00	1	11.562.683,00	1	11.851.750,00	1	12.171.748,00	1	12.585.587,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.950.000,00		5.250.000,00		5.355.000,00		5.488.875,00		5.637.075,00		5.828.735,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	7.950.000,00	1	5.250.000,00	1	5.355.000,00	1	5.488.875,00	1	5.637.075,00	1	5.828.735,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				633.783.904,00		651.996.000,00		665.035.920,00		681.661.818,00		700.066.687,00		723.868.954,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1	1	633.783.904,00	1	651.996.000,00	1	665.035.920,00	1	681.661.818,00	1	700.066.687,00	1	723.868.954,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
	Kantor yang Disediakan (Laporan)														Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.113.977,00		558.480.457,00		569.650.066,00		583.891.318,00		599.656.384,00		620.044.701,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB (Nilai)	5	5	809.113.977,00	5	558.480.457,00	5	569.650.066,00	5	583.891.318,00	5	599.656.384,00	5	620.044.701,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				31.482.800,00		28.375.000,00		28.942.500,00		29.666.063,00		30.467.046,00		31.502.926,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
atau Kendaraan Dinas Jabatan															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	31.482.800,00	1	28.375.000,00	1	28.942.500,00	1	29.666.063,00	1	30.467.046,00	1	31.502.926,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.650.500,00		168.596.700,00		171.968.634,00		176.267.850,00		181.027.082,00		187.182.003,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	66	66	193.650.500,00	66	168.596.700,00	66	171.968.634,00	66	176.267.850,00	66	181.027.082,00	66	187.182.003,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				186.986.500,00		22.510.000,00		22.960.200,00		23.534.205,00		24.169.629,00		24.991.396,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	236	236	186.986.500,00	236	22.510.000,00	236	22.960.200,00	236	23.534.205,00	236	24.169.629,00	236	24.991.396,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				396.994.177,00		338.998.757,00		345.778.732,00		354.423.200,00		363.992.627,00		376.368.376,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	396.994.177,00	1	338.998.757,00	1	345.778.732,00	1	354.423.200,00	1	363.992.627,00	1	376.368.376,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				934.780.380,00		1.207.394.400,00		1.231.952.002,00		1.263.221.236,00		1.297.562.720,00		1.342.244.811,00		
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Berdaya (Persen)	31.30	31,42	934.780.380,00	31.54	1.207.394.400,00	31.67	1.231.952.002,00	31.79	1.263.221.236,00	32.04	1.297.562.720,00	32.29	1.342.244.811,00		
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				88.274.300,00		93.014.000,00		94.905.105,00		97.316.088,00		99.956.612,00		103.393.149,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terwujudnya Kesetaraan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif (Persen)	93,41	86,73	74.738.000,00	86,73	93.014.000,00	87,76	94.905.105,00	87,76	97.316.088,00	87,76	99.956.612,00	87,76	103.393.149,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				74.738.000,00		72.854.000,00		74.335.051,00		76.223.966,00		78.290.995,00		80.981.368,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	74.738.000,00	2	72.854.000,00	2	74.335.051,00	2	76.223.966,00	2	78.290.995,00	2	80.981.368,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota				13.536.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	360	360	13.536.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		20.160.000,00		20.570.054,00		21.092.122,00		21.665.617,00		22.411.781,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	85	-	0,00	85	20.160.000,00	85	20.570.054,00	85	21.092.122,00	85	21.665.617,00	85	22.411.781,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				89.701.000,00		83.292.000,00		84.986.159,00		87.143.108,00		89.512.529,00		92.595.340,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Persen)	100	100	89.701.000,00	100	83.292.000,00	100	84.986.159,00	100	87.143.108,00	100	89.512.529,00	100	92.595.340,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				25.427.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	25.427.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				64.274.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	20	20	64.274.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0,00		75.700.000,00		77.239.738,00		79.200.083,00		81.353.533,00		84.155.348,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	20	-	0,00	20	75.700.000,00	20	77.239.738,00	20	79.200.083,00	20	81.353.533,00	20	84.155.348,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		7.592.000,00		7.746.421,00		7.943.025,00		8.158.996,00		8.439.992,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	200	-	0,00	200	7.592.000,00	200	7.746.421,00	200	7.943.025,00	200	8.158.996,00	200	8.439.992,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				756.805.080,00		1.031.088.400,00		1.052.060.738,00		1.078.762.040,00		1.108.093.579,00		1.146.256.322,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi (Persen)	57,14	57,14	756.805.080,00	57,14	1.031.088.400,00	71,43	1.052.060.738,00	71,43	1.078.762.040,00	85,71	1.108.093.579,00	85,71	1.146.256.322,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber				749.365.080,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	Sub Kegiatan sudah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada di Tahun 2026
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	200	749.365.080,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				7.440.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	3	3	7.440.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)														Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		1.031.088.400,00		1.052.060.738,00		1.078.762.040,00		1.108.093.579,00		1.146.256.322,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	4	-	0,00	4	1.031.088.400,00	4	1.052.060.738,00	4	1.078.762.040,00	4	1.108.093.579,00	4	1.146.256.322,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				6.068.001.750,00		321.620.000,00		328.161.538,00		336.490.888,00		345.638.610,00		357.540.814,00		
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	6.068.001.750,00	100	321.620.000,00	100	328.161.538,00	100	336.490.888,00	100	345.638.610,00	100	357.540.814,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				64.690.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terfasilitasinya Lembaga Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Persen)	100	100	64.690.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				64.690.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2	2	64.690.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)														Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2	-	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan				5.721.261.750,00		227.120.000,00		231.739.621,00		237.621.172,00		244.082.092,00		252.488.279,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan (Persen)	100	100	5.721.261.750,00	100	227.120.000,00	100	231.739.621,00	100	237.621.172,00	100	244.082.092,00	100	252.488.279,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				391.744.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	100	100	391.744.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5.329.517.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut	6	6	5.329.517.750,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)														Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	4	-	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	100	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)														Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		144.000.000,00		146.928.960,00		150.658.017,00		154.754.408,00		160.084.150,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	100	-	0,00	100	144.000.000,00	100	146.928.960,00	100	150.658.017,00	100	154.754.408,00	100	160.084.150,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5	-	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan				0,00		78.120.000,00		79.708.961,00		81.731.974,00		83.954.267,00		86.845.652,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota															Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	50	-	0,00	50	78.120.000,00	50	79.708.961,00	50	81.731.974,00	50	83.954.267,00	50	86.845.652,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		5.101.700,00		5.231.181,00		5.373.417,00		5.558.477,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	12	-	0,00	12	5.000.000,00	12	5.101.700,00	12	5.231.181,00	12	5.373.417,00	12	5.558.477,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				282.050.000,00		94.500.000,00		96.421.917,00		98.869.716,00		101.556.518,00		105.052.535,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas (Persen)	100	100	282.050.000,00	100	94.500.000,00	100	96.421.917,00	100	98.869.716,00	100	101.556.518,00	100	105.052.535,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				282.050.000,00											2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan (Orang)	210	210	282.050.000,00											2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		94.500.000,00		96.421.917,00		98.869.716,00		101.556.518,00		105.052.535,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	300	-	-	300	94.500.000,00	300	96.421.917,00	300	98.869.716,00	300	101.556.518,00	300	105.052.535,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.524.000.200,00		1.303.144.400,00		1.329.649.494,00		1.363.398.471,00		1.400.463.338,00		1.448.688.853,00		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV (Nilai)	463	468	1.524.000.200,00	473	1.303.144.400,00	478	1.329.649.494,00	483	1.363.398.471,00	488	1.400.463.338,00	493	1.448.688.853,00		
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga				1.469.500.200,00		1.249.420.000,00		1.274.832.340,00		1.307.190.057,00		1.342.726.618,00		1.388.963.680,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Jumlah Lembaga Ramah Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak (Persen)	63,64	72,73	1.469.500.200,00	72,73	1.249.420.000,00	81,82	1.274.832.340,00	81,82	1.307.190.057,00	90,91	1.342.726.618,00	100,00	1.388.963.680,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1.381.965.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan	143	143	1.381.965.200,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)														Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				87.535.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	87.535.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		1.249.420.000,00		1.274.832.340,00		1.307.190.057,00		1.342.726.618,00		1.388.963.680,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	143	-	0,00	143	1.249.420.000,00	143	1.274.832.340,00	143	1.307.190.057,00	143	1.342.726.618,00	143	1.388.963.680,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				54.500.000,00		53.724.400,00		54.817.154,00		56.208.414,00		57.736.720,00		59.725.173,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak (Persen)	63,64		54.500.000,00	72,73	53.724.400,00	81,82	54.817.154,00	81,82	56.208.414,00	90,91	57.736.720,00	100	59.725.173,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	54.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		53.724.400,00		54.817.154,00		56.208.414,00		57.736.720,00		59.725.173,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	15	-	0,00	15	53.724.400,00	15	54.817.154,00	15	56.208.414,00	15	57.736.720,00	15	59.725.173,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.068.824.200,00		883.145.400,00		901.107.992,00		923.979.790,00		949.098.776,00		981.781.372,00		
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V (Nilai)	195	196	1.068.824.200,00	197	883.145.400,00	198	901.107.992,00	199	923.979.790,00	200	949.098.776,00	201	981.781.372,00		
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup				880.472.000,00		668.436.000,00		682.031.403,00		699.343.037,00		718.354.149,00		743.089.899,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Daerah Kabupaten/Kota															Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (Persen)	14,29	28,57	880.472.000,00	42,86	668.436.000,00	57,14	682.031.403,00	71,43	699.343.037,00	85,71	718.354.149,00	100	743.089.899,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				511.581.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	500	500	511.581.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota				368.891.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokumen)	1	1	368.891.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan				0,00		320.775.000,00		327.298.979,00		335.607.505,00		344.728.648,00		356.596.736,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	5	-	0,00	5	320.775.000,00	5	327.298.979,00	5	335.607.505,00	5	344.728.648,00	5	356.596.736,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		347.661.000,00		354.732.424,00		363.735.532,00		373.625.501,00		386.493.163,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	1	-	0,00	1	347.661.000,00	1	354.732.424,00	1	363.735.532,00	1	373.625.501,00	1	386.493.163,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				162.142.200,00		214.709.400,00		219.076.589,00		224.636.753,00		230.744.627,00		238.691.473,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan (Persen)	100	100	162.142.200,00	100	214.709.400,00	100	219.076.589,00	100	224.636.753,00	100	230.744.627,00	100	238.691.473,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33.771.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	40	40	33.771.200,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0007 Koordinasi				128.371.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan	Sub Kegiatan sudah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pelaksanaan Layanan AMPK															Perempuan dan Anak	tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	40	40	128.371.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		52.146.000,00		53.206.650,00		54.557.035,00		56.040.441,00		57.970.474,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	60	-	0,00	60	52.146.000,00	60	53.206.650,00	60	54.557.035,00	60	56.040.441,00	60	57.970.474,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		144.000.000,00		146.928.960,00		150.658.017,00		154.754.409,00		160.084.151,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	60	-	0,00	60	144.000.000,00	60	146.928.960,00	60	150.658.017,00	60	154.754.409,00	60	160.084.151,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	60	-	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5	-	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		18.563.400,00		18.940.979,00		19.421.701,00		19.949.777,00		20.636.848,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40	-	0,00	40	18.563.400,00	40	18.940.979,00	40	19.421.701,00	40	19.949.777,00	40	20.636.848,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2	-	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban	10	-	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0001 - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)															
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				26.210.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kualitas SDM Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi (Persen)	16,67	33,33	26.210.000,00	50	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	83,33	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/				26.210.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	100	100	26.210.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	100	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				4.738.097.480,00		1.626.779.212,00		1.659.866.823,00		1.701.996.331,00		1.748.267.226,00		1.808.469.507,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				377.558.100,00		255.531.300,00		260.728.637,00		267.345.415,00		274.614.400,00		284.070.857,00		
Terkendalinya Jumlah Penduduk	ASFR 15 - 19 Tahun (Nilai)	9.1	9.5-8.7	377.558.100,00	9.5-8.7	255.531.300,00	9.4-8.6	260.728.637,00	9.4-8.6	267.345.415,00	9.3-8.5	274.614.400,00	9.3-8.5	284.070.857,00		
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				136.302.300,00		194.828.300,00		198.790.939,00		203.835.740,00		209.377.898,00		216.587.612,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Pemahaman tentang Kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota	Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan (Persen)	19,03	23,45	136.302.300,00	28,32	194.828.300,00	32,74	198.790.939,00	37,17	203.835.740,00	41,59	209.377.898,00	46,02	216.587.612,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi				15.022.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	Sub Kegiatan sudah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	43	43	15.022.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				121.279.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)	1	1	121.279.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				0,00		14.814.000,00		15.115.149,00		15.498.259,00		15.919.521,00		16.466.529,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta	64	-	0,00	64	14.814.000,00	64	15.115.149,00	64	15.498.259,00	64	15.919.521,00	64	16.466.529,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Jalur Nonformal dan Informal	Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)														Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0,00		180.014.300,00		183.675.790,00		188.337.481,00		193.458.377,00		200.121.083,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	-	0,00	1	180.014.300,00	1	183.675.790,00	1	188.337.481,00	1	193.458.377,00	1	200.121.083,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				241.255.800,00		60.703.000,00		61.937.698,00		63.509.675,00		65.236.502,00		67.483.245,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya pemanfaatan data informasi keluarga untuk pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA (Persen)	20,41	20,41	241.255.800,00	22,45	60.703.000,00	22,45	61.937.698,00	24,49	63.509.675,00	24,49	65.236.502,00	24,49	67.483.245,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				2.760.000,00		1.980.000,00		2.020.273,00		2.071.547,00		2.127.872,00		2.201.155,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	2.760.000,00	1	1.980.000,00	1	2.020.273,00	1	2.071.547,00	1	2.127.872,00	1	2.201.155,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				101.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2	2	101.400.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				61.755.800,00		47.898.000,00		48.872.245,00		50.112.622,00		51.475.184,00		53.247.989,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	61.755.800,00	1	47.898.000,00	1	48.872.245,00	1	50.112.622,00	1	51.475.184,00	1	53.247.989,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0015 - Pembentukan dan operasionalisasi				15.340.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	Sub Kegiatan sudah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	30	30	15.340.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				0,00		10.825.000,00		11.045.180,00		11.325.506,00		11.633.446,00		12.034.101,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	30	-	0,00	38	10.825.000,00	38	11.045.180,00	38	11.325.506,00	38	11.633.446,00	38	12.034.101,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.791.840.000,00		174.709.000,00		178.262.465,00		182.787.098,00		187.756.283,00		194.221.746,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Program Keluarga Berencana	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) (Persen)	40.11	40.12	1.791.840.000,00	40.13	174.709.000,00	40.14	178.262.465,00	40.15	182.787.098,00	40.16	187.756.283,00	40.17	194.221.746,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				565.253.000,00		115.059.000,00		117.399.300,00		120.378.894,00		123.651.996,00		127.910.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Menurunnya Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) (Persen)	16,91	16,82	565.253.000,00	16,71	115.059.000,00	16,6	117.399.300,00	16,48	120.378.894,00	16,35	123.651.996,00	16,21	127.910.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan	2		50.000.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)														Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				240.730.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	14		240.730.000,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				88.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2		88.000.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				12.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi	Jumlah Komunikasi, Informasi dan	1		12.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)														Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				174.523.000,00		115.059.000,00		117.399.300,00		120.378.894,00		123.651.996,00		127.910.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1		174.523.000,00	1	115.059.000,00	1	117.399.300,00	1	120.378.894,00	1	123.651.996,00	1	127.910.570,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh				194.290.000,00		10.950.000,00		11.172.722,00		11.456.284,00		11.767.777,00		12.173.056,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (Persen)	73,61	73,83	194.290.000,00	73,91	10.950.000,00	74,1	11.172.722,00	74,31	11.456.284,00	74,83	11.767.777,00	75,06	12.173.056,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				180.000.000,00		0,00		0		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	662	662	180.000.000,00	662	0,00	662	0	662	0,00	662	0,00	662	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				2.000.000,00		1.820.000,00		1.857.018,00		1.904.149,00		1.955.921,00		2.023.281,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	1	1	2.000.000,00	1	1.820.000,00	1	1.857.018,00	1	1.904.149,00	1	1.955.921,00	1	2.023.281,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga				12.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	12.290.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga				0,00		9.130.000,00		9.315.704,00		9.552.135,00		9.811.856,00		10.149.775,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															Keluarga Berencana	
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	-	0,00	1	9.130.000,00	1	9.315.704,00	1	9.552.135,00	1	9.811.856,00	1	10.149.775,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				780.297.000,00		48.700.000,00		49.690.443,00		50.951.920,00		52.336.510,00		54.138.120,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Meningkatnya Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (Persen)	76,07	77,08	780.297.000,00	77,18	48.700.000,00	77,81	49.690.443,00	77,85	50.951.920,00	78,32	52.336.510,00	78,51	54.138.120,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				46.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	63	63	46.500.000,00	63	0,00	63	0,00	63	0,00	63	0,00	63	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan				694.895.000,00		48.700.000,00		49.690.443,00		50.951.920,00		52.336.510,00		54.138.120,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1959	1959	694.895.000,00	1959	48.700.000,00	1959	49.690.443,00	1959	50.951.920,00	1959	52.336.510,00	1959	54.138.120,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				36.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	2	2	36.700.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)														Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0014 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				2.202.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kab/Kota)	1	1	2.202.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan				252.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pembinaan Kesertaan Ber-KB															Keluarga Berencana	
Meningkatnya Peran Serta Kampung KB dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	93,33	93,33	252.000.000,00	93,33	0,00	95,56	0,00	95,56	0,00	97,78	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				252.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	45	45	252.000.000,00	45	0,00	45	0,00	45	0,00	45	0,00	45	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.568.699.380,00		1.196.538.912,00		1.220.875.721,00		1.251.863.818,00		1.285.896.543,00		1.330.176.904,00		
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna (Persentase)	13.58	14.37	2.568.699.380,00	15.37	1.196.538.912,00	16.48	1.220.875.721,00	17.59	1.251.863.818,00	18.82	1.285.896.543,00	20.60	1.330.176.904,00		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				920.797.860,00		1.196.538.912,00		1.220.875.721,00		1.251.863.818,00		1.285.896.543,00		1.330.176.904,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) (Persen)	81,37	86,08	920.797.860,00	87,08	1.196.538.912,00	88,08	1.220.875.721,00	89,08	1.251.863.818,00	91,09	1.285.896.543,00	92,32	1.330.176.904,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok				315.402.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas	Sub Kegiatan sudah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1	1	315.402.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				9.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	1	1	9.600.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Sejahtera (PPKS) (Laporan)														Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				180.000.000,00		922.767.048,00		941.536.129,00		965.432.315,00		991.682.419,00		1.025.835.961,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	180.000.000,00	1	922.767.048,00	1	941.536.129,00	1	965.432.315,00	1	991.682.419,00	1	1.025.835.961,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha				130.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	20	130.000.000,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				173.356.000,00		225.733.000,00		230.324.409,00		236.170.042,00		242.591.505,00		250.946.356,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	5	5	173.356.000,00	5	225.733.000,00	5	230.324.409,00	5	236.170.042,00	5	242.591.505,00	5	250.946.356,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				112.439.360,00		48.038.864,00		49.015.183,00		50.261.461,00		51.622.619,00		53.394.587,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	495	495	112.439.360,00	495	48.038.864,00	495	49.015.183,00	495	50.261.461,00	495	51.622.619,00	495	53.394.587,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui				1.647.901.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															Keluarga Berencana	
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persentase)	100	100	1.647.901.520,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				623.401.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program	5	5	623.401.520,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)														Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				34.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan sudah tidak ada di Tahun 2026
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)	1	1	34.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon				495.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Laporan)	1		495.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				495.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat	1		495.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
	pendampingan (Laporan)														Keluarga Berencana	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0,00		117.990.000,00		-		-		-		-		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				0,00		117.990.000,00		-		-		-		-		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	N/A	N/A	0,00	45	117.990.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						117.990.000,00		-		-		-		-	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Rintisan Desa Budaya yang Perekonomian Perempuannya dikembankan (Kelurahan)	N/A	N/A	-	45	117.990.000,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.22.08.5.07.0001 - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya						54.750.000,00									2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)	N/A	N/A	-	1	54.750.000,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.22.08.5.07.0015 - Pengembangan Ekonomi Perempuan						63.240.000,00									2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*	*-17*
															Keluarga Berencana	
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya (Orang)	N/A	N/A	-	40	63.240.000,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Sumber: SIPD, 2025.

4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

DP3AP2KB Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah memiliki Program Prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Adapun Program Prioritas DP3AP2KB Kota Yogyakarta dijabarkan pada matriks berikut:

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Posyandu Paripurna : Gerakan Warga Sehat	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
2	Satu Kampung Satu Bidan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Terlaksananya Program Keluarga Berencana	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
				2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Perlindungan Khusus Anak	Meingkatnya Perlindungan Khusus Anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
		Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
				2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

Sumber: SIPD, 2025.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rumusan tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga telah menetapkan IKU sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran. Indikator tujuan dan indikator sasaran tersebut merupakan IKU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB. Adapun IKU pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	2.08.2.14.2.22.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	99,25	99,25	99,25	99,27	99,27	99,29	99,29	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,91	64,91	64,93	64,95	64,97	65	65,03	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,89	71,89	
4.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	1,65	1.53-1.65	1.53-1.65	1.55-1.67	1.55-1.67	1.57-1.69	1.57-1.69	
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Nilai	A (89,992)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992– 90,00)	A (89,992– 90,00)	A (89,992– 90,00)	
6.	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Predikat	Utama (889)	Utama (880-890)	Utama (891-900	Paripurna *) (901-905)	Paripurna (906-910)	Paripurna (911-915)	Paripurna (916-920)	

Sumber: SIPD, 2025.

Keterangan: *) yang dimaksud Paripurna adalah predikat tertinggi ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak, atau sering disebut dengan predikat KLA.

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah diperlukan tolak ukur untuk mengukur kinerja yang juga merupakan tolak ukur dalam penyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kemudian disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun DP3AP2KB Kota Yogyakarta memiliki IKK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	positif	Persentase	40,41	50,01	50,04	50,06	50,08	50,11	50,13	
3.	Rasio kekerasan terhadap	positif	Rasio	51,61	46,46	48,3	50,09	51,85	53,57	55,25	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)										
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
4.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	Persentase	62,6	62,61	62,62	62,63	62,64	62,65	62,66	
5.	TFR (Angka Kelahiran Total)	positif	Rasio	1,65	1.53-1.65	1.53-1.65	1.55-1.67	1.55-1.67	1.57-1.69	1.57-1.69	
6.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	Persentase	12,55	12,54	12,53	12,52	12,51	12,5	12,5	

Sumber: SIPD, 2025.

BAB V
PENUTUP

Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana periode 2025-2029.

Melalui penyusunan Renstra ini tampak bahwa DP3AP2KB Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Renstra ini mengidentifikasi tiga sasaran strategis utama, yaitu: (1) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Terkendalinya Angka Kelahiran melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; serta (3) Meningkatnya Tata Kelola DP3AP2KB yang baik dan adaptif dengan. Ketiga sasaran ini saling bersinergi dalam mencapai tujuan besar yaitu terwujudnya keluarga Yogyakarta yang berkualitas, mandiri, dan berketahanan.

Dalam implementasinya, kaidah pelaksanaan renstra ini mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan *participatory planning* yang melibatkan seluruh *stakeholder*, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat sipil. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan, mengingat isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk memerlukan penanganan holistik dan terintegrasi. Inovasi teknologi digital menjadi *enabler* penting dalam transformasi pelayanan, mulai dari sistem informasi manajemen terpadu, aplikasi *mobile* untuk pelaporan kekerasan, hingga *platform digital* untuk layanan keluarga berencana.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Sistem pengendalian mencakup three levels monitoring: (1) Level Strategis melalui review triwulanan pencapaian indikator kinerja utama dengan dashboard real-time yang terintegrasi dengan sistem e-government Kota Yogyakarta; (2) Level Operasional melalui monitoring bulanan progres kegiatan dan anggaran dengan melibatkan seluruh unit kerja; dan (3) Level Masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat dan *mechanism complaint handling* yang responsif. Evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi, *mid-term review* pada tahun 2027, dan *final evaluation* pada akhir periode 2029 dengan menggunakan pendekatan *outcome* dan *impact evaluation.*

Sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan Renstra ini mengacu pada pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah kota memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan urusan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan pusat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sementara koordinasi horisontal dengan OPD lain dilakukan melalui forum-forum koordinasi sektoral yang ada.

Keberhasilan implementasi Renstra ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Kota Yogyakarta yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Kerkeadaban", khususnya dalam dimensi kesejakteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Dengan komitmen penuh dari seluruh elemen organisasi DP3AP2KB, dukungan kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta, serta partisipasi aktif masyarakat, Renstra 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi katalisator transformasi menuju keluarga Yogyakarta yang berkualitas dan berdaya saing global, sekaligus menjadi model *best practice* yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia dalam upaya mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan berkualitas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

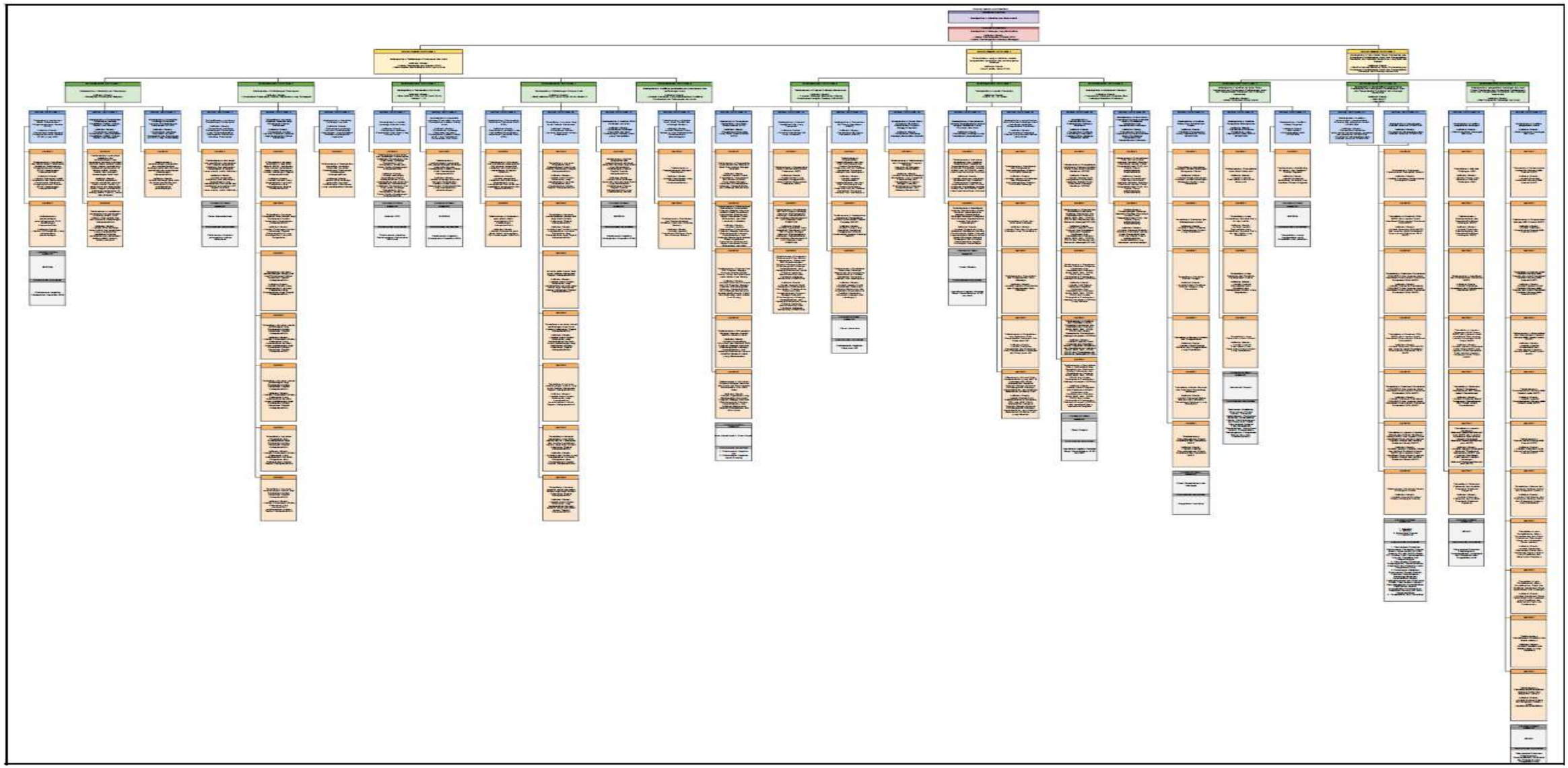

Lampiran 2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	95,26	95,27	95,28	95,29	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,86	71,86	71,86	71,86	71,89	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Perempuan	((Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan x 25%) + (Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta x 25%) + (Proporsi jumlah anggaran responsif gender terhadap dokumen analisis gender terhadap anggaran responsif gender (ARG) x 50%))	Kepala Bidang PPP	31,42	31,54	31,67	31,78	32,04	32,29

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Penanggung Jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Penanggung Jawab	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penggampu	Pagu					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
					100	100	100	100	100	100				100	100	100	100	100	100					100	100	100	100	100	100						100	100	100	100	100	100						2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga
					Kepala Bidang PPP									Kepala UPT PPA										Tim Kerja PAP											UPT PPA											UPT PPA					
				(Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada) x 100%									(Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Tersedia) x 100%											Jumlah Layanan yang Tersedia											Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan											Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan					
				Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan									Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan											Persentase Jumlah Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan											Persentase Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan											Persentase Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan					
				Tersosialisasinya Lembaga Perlindungan Perempuan									Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan											Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan											Terlaksananya sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota											Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota					
				Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan / Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada) x 100%									(Jumlah Layanan yang Tersedia / Jumlah Layanan yang Ada) x 100%											Jumlah Layanan yang Tersedia											Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan											Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan					
				Persentase Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan									Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan											Persentase Jumlah Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan											Persentase Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan											Persentase Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan					
				Tersosialisasinya Lembaga Perlindungan Perempuan									Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan											Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan											Terlaksananya sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota											Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota					

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Penanggung Jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Penanggung Jawab	Pagu					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030								
					72	72	81	81	90	10					72	72	81	81	90	10					46	47	47	48	48	49					72	72	81	81	90	10								
					7	7	8	8	9	0					7	7	8	8	9	0					8	3	8	3	8	3					7	7	8	8	9	0								
					3	3	2	2	1	0					3	3	2	2	1	0															3	3	2	2	1	0								

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
																				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Menngkatnya Perlindungan Khusus Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	19 6	19 7	19 8	19 9	20 0	20 1

No	Nama Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Perhitungan	Target					Satuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target					Satuan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formula Perhitungan	Target					Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Perhitungan	Target						Satuan	Subkegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pagu						
					2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029				
					20	20	20	20	20					20	20	20	20	20						20	20	20	20	20						20	20	20	20	20						20	20	20	20	20				
					26	27	28	29	30					26	27	28	29	30						26	27	28	29	30						26	27	28	29	30						26	27	28	29	30				

| No | Nama Perangkat Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung Jawab | Target | | | | | | | Sasaran Operasional (Sub Output) | Indikator Kinerja (Sub Output) | Penggunaan | Target | | | | | | | Pagu | | | | | |
|---|---|---

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Target						Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target							Pagu				
															2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Meningkatnya Pelaksanaan KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persentase Kampung KB yang Pelaksanaan KB Pasca Persalinan (KBPP)	(Jumlah Kampung KB yang melaksanakan KB Pasca Persalinan (KBPP) / Jumlah Kampung KB yang ada) x 100%	Rp6.130.000	Pelaksanaan dan Pembinaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pembinaan Program Bangga Kencana di Kampung KB Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembinaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tim Kerja KB	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	Rp6.130.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
											Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Ketersediaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tim Kerja KB	1.959 Orang	1.959 Orang	1.959 Orang	1.959 Orang	1.959 Orang	1.959 Orang	Rp48.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
											Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tim Kerja KB	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
											Pelaksanaan dan Pembinaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pembinaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tim Kerja Kependudukan.	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	45 Kampung	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Penanggung jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Penanggung jawab	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penggampu	Pagu					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					9,3 - 8,5	9,4 - 8,6	9,5 - 8,7																																													
					Kepala Badan PPD																																														
					ASFR 15-19 Tahun																																														
					ASF R 15 -19 Tahun																																														
					Terendalimya Jumlah Penduduk																																														
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																																													
					Pemerataan dan Pembinaan Kependuduk an dan Keluarga Berencana di Kabupaten/ Kota																																													
					Meningkatnya pemanfaatan informasi Keluarga untuk pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk																																													
					Persentase Lembaga yang Tereduksi Kependudukan																																													
					(Jumlah Sekolah Sasaran Kependudukan (SSK) yang Dibentuk dan tereduksi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota Yogyakarta) x 100%																																													
					Jumlah SMP dan SD di Kota Yogyakarta																																													
					Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan dan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peminjatan Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																																													
					Terlaksanya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan dan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peminjatan Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																																													
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan dan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peminjatan Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																																													
					Tim Kerja Dalduk																																														
					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
					64 Satuan Penduduk	64 Satuan Penduduk	64 Satuan Penduduk	64 Satuan Penduduk	64 Satuan Penduduk	64 Satuan Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																																													
					Terlaksanya advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																																													
					Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan dan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peminjatan Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																																													
					Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																																													
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang Tersediany a																																													
					Tim Kerja DIGA APPKB

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Program	Program	Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	20.60 Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab	Pagu					Pagu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030
														Terlaksananya Pengelolaan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	x 100%	Tim Kerja DIG APP KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
														Dibentuknya Data Kependudukan yang sakti di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	x 100%	Tim Kerja DIG APP KB	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit
														Terlaksananya Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelaporan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	x 100%	Tim Kerja PK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
														Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembentukan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembentukan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	x 100%	Tim Kerja PK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
														Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	(Jumlah Kelompok Kegiatan BKS yang Melapor : Jumlah Kelompok Kegiatan BKS) x 100%	Kepala Bidang KB PK	86,08	87,08	88,08	89,09	91,09	92,32
														Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembentukan Usaha Ekonomi Keluarga(UPPKS))	Persentase Data Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	(Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna : Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) x 100%	Kepala Bidang KB PK	14,37	15,37	16,48	17,59	18,62	20,60

| No | Nama Perangkat Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Pagu | Target | | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanganan pu | Target | | | | | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanganan pu | Target | | | | | | Sub Kegiatan | Sasaran Operasional (Sub Output) | Indikator Kinerja (Sub Output) | Penggampu | Pagu | Target | | | | | | |
|---|---|---

| No | Nama Perangkat Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung jawab pu | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung jawab pu | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung jawab pu | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung jawab pu | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 |
|---|---|---

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu	Target										Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penggam pu	Pagu	Target										Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penegelolaan keuangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPK AD	Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	5					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp5.851.902.329	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp2.741.726.932	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kepala Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp4.729.500.000	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepala Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp7.789.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepala Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp8.577.000.000	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan				
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp3.379.000.000	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan				
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp5.851.902.329	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan				
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp2.741.726.932	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target										Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030		

| No | Nama Perangkat Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target | | | | | | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Penanggung jawab | Target | | | | | | | Sub Kegiatan | Sasaran Operasional (Sub Output) | Indikator Kinerja (Sub Output) | Penanggung jawab | Target | | | | | | | Pagu | | | | | | |
|---|---|---

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
																															Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Perhitungan	Pagu					Target					Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					Pagu				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3A P2KB	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3 AP2KB oleh BPKAD	Rp28.375.000	Rp28.942.500	Rp29.666.063	Rp30.467.046	Rp31.302.925	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.08.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayerkan Pajaknya	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp28.375.000	Rp28.942.500	Rp29.666.063	Rp30.467.046	Rp31.302.925
				Rp16.596.700	Rp17.968.634	Rp17.267.850	Rp18.027.082	Rp18.807.003	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	2.08.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayerkan Pajak dan Perizinannya	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	Rp16.596.700	Rp17.968.634	Rp17.267.850	Rp18.027.082	Rp18.807.003
				Rp22.510.000	Rp22.960.200	Rp23.534.205	Rp24.169.629	Rp24.991.396	236 Unit	236 Unit	236 Unit	236 Unit	236 Unit	2.08.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	236 Unit	236 Unit	236 Unit	236 Unit	236 Unit	Rp22.510.000	Rp22.960.200	Rp23.534.205	Rp24.169.629	Rp24.991.396
				Rp33.048.757	Rp34.775.732	Rp35.423.200	Rp36.592.627	Rp37.368.376	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.08.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp33.048.757	Rp34.775.732	Rp35.423.200	Rp36.592.627	Rp37.368.376
				Rp5.390.000	Rp5.497.800	Rp5.635.245	Rp5.787.397	Rp5.984.168	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.08.01.2.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp5.390.000	Rp5.497.800	Rp5.635.245	Rp5.787.397	Rp5.984.168
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DP3A P2KB	Indeks Profesionalitas ASN DP3A P2KB	Hasil nilai IP ASN DP3 AP2KB						84,82	84,83	84,84	84,85	84,86	2.08.01.2.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	84,82	84,83	84,84	84,85	84,86					84,87

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target										Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggapu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030													

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target										Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu					Target								Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu					Target								Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030								2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pagu					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu Anggaran	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penagampu	Target						Pagu					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp78 0.000	Rp79 5.600	Rp81 5.490	Rp83 7.508	Rp88 5.984
											2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp33 .075. 000	Rp63 .736. 500	Rp34 .579. 913	Rp65 .513. 570	Rp36 .721. 032

Sumber: DP3AP2KB

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Target						Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030	

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA

2025 - 2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan Ringroad, Malangan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163
Telp/Fax. (0274) 4396955 E-mail: pertanianpangan@jogjakota.go.id
Website : pertanian.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

PENGANTAR

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahunan. Rensta PD adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD.

Penyusunan Renstra PD Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, memberikan arah pembangunan dalam urusan pangan, pertanian dan perikanan, serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam rangka membangun komitmen bersama mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah secara sinergis dan berkesinambungan.

Telah menjadi komitmen dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat menjadi institusi yang handal dalam mewujudkan ketahanan pangan, pengawasan mutu pangan, kesehatan masyarakat veteriner serta masyarakat pertanian dan perikanan perkotaan berbasis agribisnis yang mandiri. Tidak semua persoalan pangan, perikanan dan pertanian akan bisa diselesaikan secara tuntas, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DPP yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis DPP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan.

Yogyakarta, 15 September 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA

SUKIDI, SE., MSi
NIP. 196811061992031005

DAFTAR ISI

		Halaman
	PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	33
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
	3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	37
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	
	4.1 Uraian Program	39
	4.2 Uraian Kegiatan	45
	4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	46
	4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	57
	4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	58
	4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	58
BAB V	**PENUTUP**	59
LAMPIRAN	Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)	60

DAFTAR TABEL

		Halaman
2.1	Sarana Prasarana Perkantoran	11
2.2	Pencapaian Kinerja IKU Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024	16
2.3	Capaian Pelaksanaan IKK Perangkat Daerah 2020-2024	22
2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
3.1	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029	33
3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	36
3.3	Penahapan Renstra PD	37
3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	37
4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029	40
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	47
4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra 2025-2029	48
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	58
4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana untuk setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra PD merupakan derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang berpedoman kepada RPJMD.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Yogyakarta, telah disusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renstra PD Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025, dimana sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra PD Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian.

Dalam tatakelola pembangunan daerah khususnya penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya sinergi antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Bagan alur keterkaitan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Mengingat peran dan fungsi penting Renstra Perangkat Daerah bagi pemerintah maupun masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis pada Rencana Kerja (Renja) Dinas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 87);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penglolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 249);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 147);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 185);
23. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 57);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 60);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1055);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 124);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1541);
31. Permentan no. 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 7);
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 98);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 262);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
39. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514);
42. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 677);
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);

44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 881);
45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542);
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672);
47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869);
48. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 898);
49. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
50. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Baku Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 151);
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
52. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022–2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
57. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 123);
58. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 13);
59. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
60. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);

61. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2);
63. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 161);
64. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Sawah Beririgasi Teknis (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 114);
65. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22);
66. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 128);
67. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 51);
68. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 17);
69. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan Pangan, urusan Pertanian serta urusan Kelautan dan Perikanan, dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini ditujukan untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta selama periode 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya, dasar hukum peraturan perundangan yang menjadi acuan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD serta sistematika penulisan Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Memuat informasi tentang tupoksi dan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya.
- Memuat permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Uraian progam
- Uraian kegiatan
- Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

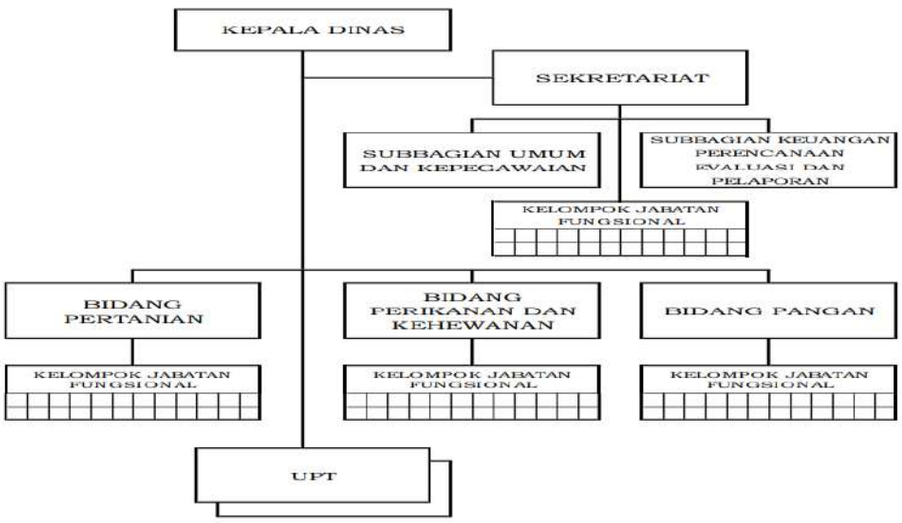

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terdiri dari :

a. Kepala Dinas; mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan.
b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang bertugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Sekretariat terdiri atas :
    1) Subagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
    2) Subagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Subagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanian yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pertanian, yang meliputi fungsi :
   1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pertanian;
   2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan dan pembinaan pertanian;
   3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pertanian;
   4) pengelolaan sarana prasarana pertanian;
   5) penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian;
   6) pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik pertanian;
   7) pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian;
   8) bimbingan usaha pertanian dan peternakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
   9) fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian;
   10) pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian;
   11) fasilitasi pemasaran komoditas pertanian;
   12) pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pertanian;
   13) pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pertanian;
   14) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pertanian;
   15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pertanian;
   16) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pertanian;
   17) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pertanian;
   18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pertanian.

d. Bidang Perikanan dan Kehewanan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan perikanan dan kehewanan, yang meliputi :
   1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;
   2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan perikanan dan kehewanan;
   3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;
   4) bimbingan usaha perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
   5) pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik perikanan;
   6) pengelolaan sarana prasarana perikanan;
   7) pengembangan kapasitas pembudidaya perikanan;
   8) fasilitasi pemasaran komoditas perikanan;
   9) pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perikanan;
   10) pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   11) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
   12) pengembangan kapasitas pembudidaya kehewanan;
   13) pengelolaan layanan jasa medik veteriner;
   14) pengelolaan rumah potong hewan;
   15) pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang kehewanan;
   16) pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perikanan dan kehewanan;
   17) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;

18) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;
19) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;
20) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perikanan dan Kehewanan;
21) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perikanan dan Kehewanan.

e. Bidang Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pangan yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pangan, yang meliputi fungsi :
1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pangan;
2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pangan;
3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pangan;
4) pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan;
5) pemantauan ketersediaan bahan pangan;
6) perencanaan kebutuhan pangan lokal;
7) pembinaan jaringan distribusi pangan;
8) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan penanganan kerawanan pangan;
9) penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
10) pengawasan mutu pangan, pertanian, kehewanan, dan perikanan;
11) pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
12) pengelolaan laboratorium mutu pangan;
13) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pangan;
14) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pangan;
15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pangan;
16) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pangan;
17) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pangan.

f. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, per 31 Agustus 2025 dinas didukung oleh pegawai sebanyak 163 orang terdiri dari : 60 orang PNS, 13 orang PPPK, 30 orang tenaga jasa lainnya orang perseorangan, 58 tenaga outsourching dan 2 orang tenaga bantuan dari Pemerintah Pusat, dengan komposisi per bidang sebagai berikut :

No.	Bidang	PNS	PPPK	PJLOP	OS	PUSAT	Jumlah
1	Sekretariat	15	1	3	31	-	**50**
2	Bidang Pangan	6	5	7	-	-	**18**
3	Bidang Pertanian	17	6	7	18	-	**48**
4	Bidang Kehewanan dan Perikanan	22	1	13	9	**2**	**47**
	Total	**60**	**13**	**30**	**58**	**2**	**163**

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, 31 Agustus 2025

Berdasarkan pangkat dan golongan, ASN Dinas Pertanian dan Pangan memiliki komposisi sebagai berikut berikut :

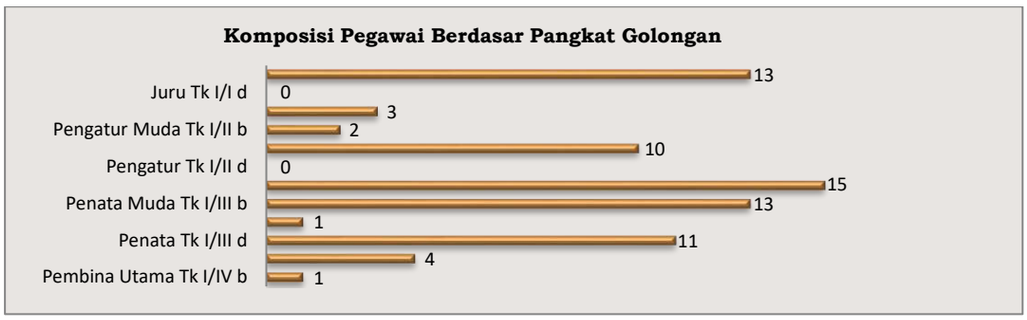

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, 31 Agustus 2025

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, ASN Dinas Pertanian dan Pangan memiliki komposisi sebagai berikut :

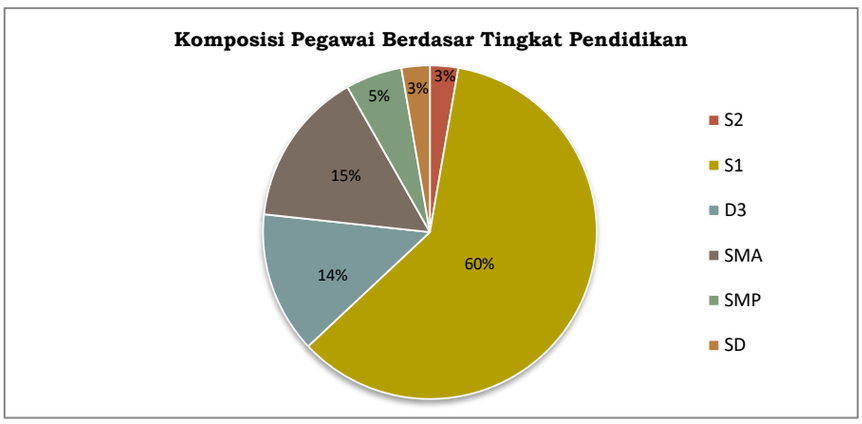

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, 31 Agustus 2025

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menyelenggarakan operasional pelaksanaan kegiatan dinas memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor serta peralatan dan perlengkapan kantor yang meliputi :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Perkantoran

NO	JENIS ASET	LUAS / JUMLAH
I	**TANAH**	
	Lokasi 1: Kantor Induk dan KPNP	19.525 m2
	Lokasi 2: Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	7.811 m2
	Lokasi 3: BBI Ikan Konsumsi Mendungan	3.000 m2
	Lokasi 4: BBI Ikan Hias dan BPP Nitikan	12.839 m2
	Lokasi 5: Poliklinik Hewan	200 m2
	Lokasi 6: Sub Raiser Ikan Hias	1.412 m2
	Lokasi 7: Kebun Bibit Tegalrejo	15.840 m2
II	**BANGUNAN**	
	Lokasi 1: Kantor Induk	
	- Bangunan Kantor Induk	2 unit
	- Laboratorium Kultur jaringan	1 unit
	- Laboratorium Olahan Pangan	1 unit
	- Pendopo Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP)	1 unit
	- Rumah Jaga KPNP	1 unit
	- Greenhouse	10 unit
	- Rumah Aklimatisasi	2 unit
	- Rumah Jaga Kebun Hortikultura	1 unit
	Lokasi 2: Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	
	- Rumah Dinas	1 unit
	- Rumah Jaga	1 unit
	- Bangunan Rumah Pemotongan Hewan	2 unit
	- Pos Satpam	1 unit

	- Pos Herkeuring	1 unit
	- Rumah Pupuk	1 unit
	- IPAL	1 unit
	- Kantor Administrasi	1 unit
	- Aula	1 unit
	- Kandang Hewan	3 unit
	- Rumah Genset	1 unit
	- Tempat Penurunan Ternak	1 unit
	- Lab Uji Mutu	1 unit
	- Tempat parkir	2 unit
	Lokasi 3: BBI Ikan Konsumsi Mendungan	
	- Rumah Jaga	1 unit
	- Kantor BBI	1 unit
	- Kolam ikan	29 unit
	Lokasi 4: BBI Ikan Hias dan BPP Nitikan	
	- Rumah Dinas	1 unit
	- Aula	2 unit
	- Kolam ikan	71 unit
	- Akuarium dinding	37 unit
	- Bangunan BPP	1 unit
	- Rumah Jaga	1 unit
	- Demplot	2 unit
	- Greenhouse	1 unit
	Lokasi 5: Poliklinik Hewan	
	- Poliklinik	1 unit
	- Kantor administrasi	1 unit
	- Rumah dinas	1 unit
	- Kandang hewan	1 unit
	- Tempat parkir	1 unit
	- Gudang Limbah B3	1 unit
	- Pos Satpam	1 unit
	- Sumur Pembuangan Bangkai	1 unit
	Lokasi 6: Sub Raiser Ikan Hias	
	- Gedung Sub Raiser	1 unit
	- Kios perikanan	1 unit
	- Tempat parkir	1 unit
	Lokasi 7: Kebun Bibit Tegalrejo	
	- Gudang pupuk	1 unit
III	**KENDARAAN BERMOTOR**	
	Kendaraan Roda 4 Penumpang	5 unit
	Kendaraan Roda 4 Barang	4 unit
	Kendaraan Roda 3	3 unit
	Kendaraan Roda 2	29
IV	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	
	Alat-alat Besar	23 unit
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	52 unit
	Alat-alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan	905 unit
	Alat-alat Kantor dan Rumahtangga	2.159 unit
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	21 unit
	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	29 unit
	Alat-alat Laboratorium	98 unit
	Alat-alat Komputer dan Laptop	75 unit
	Alat-alat Peraga	11 unit
	Bahan Perpustakaan	381 unit

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, 31 Agustus 2025

Adapun sarana dan prasarana tersebut terbentuk menjadi beberapa unit pelayanan yang mendukung kinerja bidang-bidang dan berpotensi pendapatan, yang meliputi:

1. Bidang Pertanian

a. Kebun Plasma Nutfah Pisang

Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP) merupakan salah satu objek pendapatan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yang menyimpan berbagai kultivar pisang sebagai upaya melestarikan keanekaragaman jenis-jenis pisang dengan cara konservasi ex situ. Memiliki luas sekitar 1,5 Ha KPNP memiliki koleksi sebanyak 333 kultivar pisang dari seluruh Indonesia dan dari beberapa negara di Asia.

Saat ini yang menjadi andalan dari KPNP adalah pisang Raja Bagus yang merupakan kultivar pisang asli Kota Yogyakarta yang memiliki rasa lebih manis dan legit dibanding jenis pisang Raja yang lain. Kini KPNP mulai mengembangkan benih pisang yang berkualitas dengan ditandainya pemberian sertifikat benih pada benih hasil produksinya seperti benih pisang pisang Raja Bagus, pisang Raja Bulu Kuning, Pisang Kepok Tanjung, dan Pisang Sang Mulyo.

Kegiatan yang dilakukan di KPNP adalah perawatan dan pelestarian kultivar pisang, peremajaan tanaman (rejuvenasi) pisang, identifikasi ulang (determinasi) kultivar pisang, eksplorasi dan penambahan kultivar pisang, edukasi dan konsultasi teknologi budidaya pisang, produksi benih pisang, sertifikasi Rumpun Induk Populasi Pisang dan benih pisang. Sedangkan fasilitas layanan yang tersedia di KPNP adalah penjualan benih pisang, kunjungan edukasi, konsultasi teknologi budidaya pisang, PKL, magang, dan penelitian.

b. Laboratorium Kultur Jaringan

Laboratorium Kultur Jaringan dibangun untuk mendukung keberadaan KPNP sebagai konservasi ex situ pisang, dimana kultur jaringan menjadi jalan yg tepat untuk mencegah kepunahan pisang dari penyakit serta bencana yang ada serta menjadi plasma nutfah pisang dalam bentuk yang lebih ringkas untuk disimpan. Pada saat ini Laboratorium Kultur Jaringan memproduksi benih pisang, benih tanaman hias serta menjadi pembelajaran masyarakat, mahasiswa, maupun instansi lain dalam teknologi terbarukan dalam dunia pertanian. Untuk mendukung pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Lokal Kota Yogyakarta kini Laboratorium Kultur Jaringan mulai mengembangkan inovasi untuk melakukan kultur in vitro pada tanaman keras seperti Mangga Cempura dan Mangga Semar sehingga dapat menyimpan SDG dalam bentuk yang lebih ringkas dan menghindari kepunahan akibat hama penyakit maupun bencana alam.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Lab Kultur Jaringan ini adalah produksi benih pisang kultur jaringan, perawatan benih pisang, produksi benih tanaman hias (anggrek, aglaonema, dll), sertifikasi benih pisang, edukasi dan konsultasi kultur jaringan. Adapun fasilitas layanan dari Lab Kultur Jaringan adalah penjualan benih pisang, penjualan eksplan, kunjungan edukasi, konsultasi teknologi budidaya pisang, PKL, magang, dan penelitian.

c. Kebun Hortikultura

Selain KPNP, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki Kebun Hortikultura yang memproduksi dan menjual berbagai bibit tanaman dari seluruh Indonesia bahkan beberapa diantaranya merupakan varietas tanaman langka seperti Duku Nitikan, Mangga Semar, Mangga Cempura. Selain koleksi tanaman langka Kebun Hortikultura sudah memiliki varietas tanaman buah bersertifikat sebanyak 9 varietas tanaman yaitu : Jambu Biji Kristal, Belimbing Dewa Baru, Kelengkeng Kateki, Mangga Garifta Merah, Jambu Biji Mega Merah, Rambutan Binjai, Alpokat Cipedak, Jambu Air Dalhari dan Duku Nitikan.

Kegiatan yang dilakukan pada Kebun Hortikultura adalah perawatan dan pelestarian tanaman, produksi benih tanaman buah, produksi benih tanaman hias, produksi benih tanaman obat keluarga/biofarmaka, sertifikasi pohon induk tunggal dan benih tanaman buah, edukasi dan konsultasi budidaya tanaman, eksplorasi dan identifikasi SDG lokal Kota Yogyakarta. Sedangkan fasilitas layanan yang disediakan adalah penjualan benih tanaman buah, penjualan benih tanaman hias, penjualan benih tanaman obat keluarga/ biofarmaka, penjualan tanaman buah dalam pot (Tabulampot), kunjungan edukasi, konsultasi teknologi budidaya tanaman buah ataupun hias, PKL, Magang, dan Penelitian.

d. Kebun Benih Tegalrejo

Kebun Benih Tegalrejo berada di Jalan Sidomulyo, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Kebun

Bibit Tegalrejo berdiri pada tahun 1970-an dengan total luas lahan 17.745 m2. Lahan Kebun Bibit Tegalrejo digunakan sebagai media pengembangan bibit padi dan sampai saat ini Kebun Bibit Tegalrejo hanya memproduksi calon benih padi yang dikerjasamakan dengan produsen benih padi bersertifikat/berlabel.

Pada tahun 2024 telah dilakukan kajian ilmiah pengembangan Kebun Benih Tegalrejo yang direncanakan menjadi Agropolitan Tegalrejo, sebuah kawasan pertanian perkotaan yang mengintegrasikan antara budidaya, hobies dan pemasaran sektor pertanian.

2. Bidang Perikanan dan Kehewanan

a. Poliklinik Hewan

Poliklinik Hewan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup besar, dengan menyediakan layanan kesehatan hewan atau jasa medik veteriner. Pasien Poliklinik Hewan Kota Yogyakarta didominasi oleh hewan kesayangan dan unggas. Jenis pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan di Poliklinik meliputi : 1) Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan; 2) Vaksinasi; 3) Rawat Inap dan Penitipan Sehat; 4) Pelayanan Grooming; 5) Pemeriksaan Laboratorium; 6) Tindakan Operasi; 7) Pemasangan Kateter; 8) Pemeriksaan Kebuntingan; dan 9) Pemeriksaan Kesehatan untuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

Perkembangan Poliklinik Hewan sejak tahun 2021 selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin dilengkapinya sarana dan prasarana operasional poliklinik. Jumlah layanan pada tahun 2021 sebanyak 14.130 tindakan meningkat menjadi 39.413 tindakan pada 2023. Jumlah hewan diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 5.649 ekor meningkat menjadi 11.419 ekor pada tahun 2023, dan jumlah klien pada tahun 2021 sebanyak 3.468 orang meningkat menjadi 6.238 orang pada tahun 2023.

b. Rumah Pemotongan Hewan

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sebagai salah satu sumber pendapatan Dinas, setiap hari dapat melayani rata-rata 4 ekor sapi/kerbau/kuda per hari dan 15 ekor kambing/domba. Kegiatan yang dilakukan di RPH selain layanan pemotongan hewan adalah sebagai tempat praktik pembelajaran dan penelitian bagi siswa dan mahasiswa, menjadi tempat praktik pelatihan panitia kurban/takmir masjid, menjadi tempat pelaksanaan studi banding, melayani pemotongan hewan kurban, menyediakan bantuan pupuk untuk kelompok atau masyarakat dan layanan mobil pengakutan daging.

c. Balai Benih Ikan Hias

Balai Benih Ikan (BBI) Hias Nitikan memiliki luas ±7000 meter2, mempunyai tugas melaksanakan pembenihan berbagai jenis ikan hias air tawar untuk menghasilkan ikan hias berkualitas khususnya di dalam wilayah Kota Yogyakarta sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah yang dikenal sebagai sentra ikan hias seperti Jawa Timur. Disamping itu BBI Hias juga memenuhi kebutuhan dan ketersediaan ikan hias dalam kota, serta menjadi sarana edukasi tentang ikan hias. Fasilitas yang tersedia di BBI Nitikan adalah kolam ukuran 2,5 m x 3 m sebanyak 64 buah, kolam ukuran 5 m x 5 m sebanyak 2 buah, kolam tebar sebanyak 6 buah, kolam tanah sebanyak 1 buah, aquarium dinding sebanyak 37 buah dan aquarium sebanyak 76 buah.

d. Balai Benih Ikan Konsumsi

Balai Benih Ikan (BBI) Konsumsi Mendungan memiliki luas ±4000 meter2. Sejak tahun 2003 Balai Benih Ikan Nitikan melaksanakan kegiatan pembibitan ikan nila merah dan lele, memproduksi bibit ikan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing, serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Produksi yang dihasilkan berupa bibit ikan nila merah dan lele berkualitas yang siap dipasarkan sesuai permintaan, dengan pemasaran di wilayah dalam Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta, dengan sasaran pembudidaya ikan yang ada di Kota Yogyakarta. Jenis bibit lele yang dikembangkan adalah jenis lele mutiara. Indukan ikan nila merah dan indukan ikan lele yang dikembangkan di BBI Mendungan berasal dari UPTD BPTPB Cangkringan, Sleman dengan induk yang berkualitas dan pengelolaan sudah menerapkan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) akan menghasilkan benih yang berkualitas.

e. Sub Raiser

Sub Raiser berada Jalan Bantul KM 1, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, berdampingan dengan Pasar Satwa dan Tananam Hias Yogyakarta, memilili luas ±1000 meter2 . Sub Raiser ikan hias didirikan pada tahun 2005 untuk memfasilitasi pemasaran ikan hias di wilayah Kota Yogyakarta. Tujuan pembangunan Sub Raiser adalah untuk mengembangkan potensi ikan

hias yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan dan ketersediaan aneka ikan hias, melaksanakan kegiatan budidaya dan perbaikan kualitas aneka ikan hias serta sebagai ajang romosi produk perikanan. Saat ini, Sub Raiser dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya aneka ikan hias seperti Manfish, Black Ghost dan Cychlid. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong berkembangnya minat budidaya ikan hias di wilayah Kota Yogyakarta. Produksi yang dihasilkan berupa aneka ikan hias berkualitas yang siap dipasarkan sesuai permintaan, dengan pemasaran di wilayah dalam Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta, dengan sasaran pembudidaya dan pedagang ikan hias.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pada masing-masing bidang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah penanganan dan memberikan pelayanan kinerja yang optimal. Pada bidang pangan, dukungan regulasi perlu dilakukan serta perlu adanya pengadaan untuk laboratorium pengujian mutu dan kualitas bahan pangan segar yang terakreditasi.

Pada bidang perikanan dan kehewanan dalam hal meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, telah dilaksanakan Kajian Pengembangan Poliklinik Hewan menjadi Rumah Sakit Hewan. Selain itu juga tengah dilakukan berbapai upaya untuk mengoptimalkan layanan Rumah Pemotongan Hewan, serta Balai Benih Ikan.

Kemudian pada bidang pertanian, sebagai langkah untuk mengembangkan Kebun Plasma Nutfah Pisang akan dilakukan peningkatan kapasitas melalui perbaikan berbagai sarana dan prasarana seperti saluran air dan jalan inspeksi, penambahan mesin dan peralatan pemeliharaan tanaman, peningkatan kapasitas Laboriatorium Kultur Jaringan dengan perluasan ruangan lab dan penambahan sarana prasarana. Selain itu juga telah dilaksanakan Kajian Pengembangan Kawasan Pertanian Perkotaan di Kebun Bibit Tegarejo sebagai potensi destinasi agrowisata guna menciptakan sinergo antara sektor pariwisata, pertanian, pendidikan, kuliner dan budidaya sebagai model ekowisata.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Capaian Pelaksanaan Urusan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogayakarta yang utama berkaitan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenanganannya, yaitu :

- Urusan Pangan (Wajib)
- Urusan Pertanian (Pilihan)
- Urusan Kelautan dan Perikanan (Pilihan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan dan sasaran perangkat daerah mengalami perubahan antara tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2022, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tujuan dan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi dengan indikator kinerja Angka Ketersediaan Energi (AKE), mengacu pada periode Renstra PD Tahun 2017-2022.

Pada periode Rentra PD Tahun 2023-2026 sebagai periode transisi karena belum ada kepala daerah terpilih, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 5 sasaran perangkat daerah pada urusan teknis, dan 1 sasaran pada urusan penunjang yang baru digunakan mulai tahun 2023, yaitu :

1) Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan
2) Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
3) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan
4) Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani
5) Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
6) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja IKU Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Satuan Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Urusan Pangan**																
	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/ kapita/ hari	2.500	2.500	2.500	-	-	2.594	2.606	2.692	-	-	103.76	104.28	107.7	-	-
	Angka Konsumsi Pangan	poin	-	-	-	90.4	91.2	-	-	-	91.2	92.12	-	-	-	100.88	101.01
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	-	-	-	89.47	85.29	-	-	-	93.41	85.35	-	-	-	104.4	100.07
2.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**																
	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	-	-	-	35.46	35.92	-	-	-	35.89	36	-	-	-	101.21	100.22
3.	**Urusan Pertanian**																
	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	-	-	-	3.99	5.90	-	-	-	5.80	6.42	-	-	-	145.36	108.81
	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-	-	-	11.82	14.29	-	-	-	68.18	100	-	-	-	576.82	699.79
4.	**Urusan Penunjang**																
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	-	-	-	A	A	-	-	-	A	AA	-	-	-	100	100

Dari seluruh realisasi kinerja indikator sasaran perangkat daerah sejak tahun 2020 sampai 2024 seluruhnya memperoleh capaian kinerja di atas 100%, artinya seluruh target sasaran semuanya dapat tercapai. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Urusan Pangan
   a. Program yang dilaksanakan
      1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
      2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
      3) Penanganan Kerawanan Pangan
      4) Pengawasan Keamanan Pangan
      5) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   b. Capaian Kinerja
      1) Pola Pangan Harapan (PPH)

         Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

         Skor PPH Kota Yogyakarta berdasarkan Data SUSENAS tahun 2024 sebesar 91,61 yang termasuk dalam kategori baik. Kelompok pangan yang sudah mencapai skor

maksimum adalah pangan hewani, sayur dan buah. Kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum adalah padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Perkembangan konsumsi energi dan skor PPH Kota Yogyakarta tahun 2017 2023 berdasarkan data SUSENAS adalah fluktuatif sesuai dengan kondisi. Skor PPH tahun 2024 dengan data SUSENAS (n) diperoleh sebesar 91,61 yang mengalami penurunan dari tahun 2024, namun demikian skor tersebut masuk dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kota Yogyakarta sudah cukup beragam, namun masih terdapat beberapa konsumsi pangan yang masih bisa untuk ditingkatkan. Pada tahun 2024, kelompok pangan padi-padian tidak mencapai skor maksimal yaitu 23 dari 25, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan konsumsi padi-padian yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi jumlah konsumsi nasi.

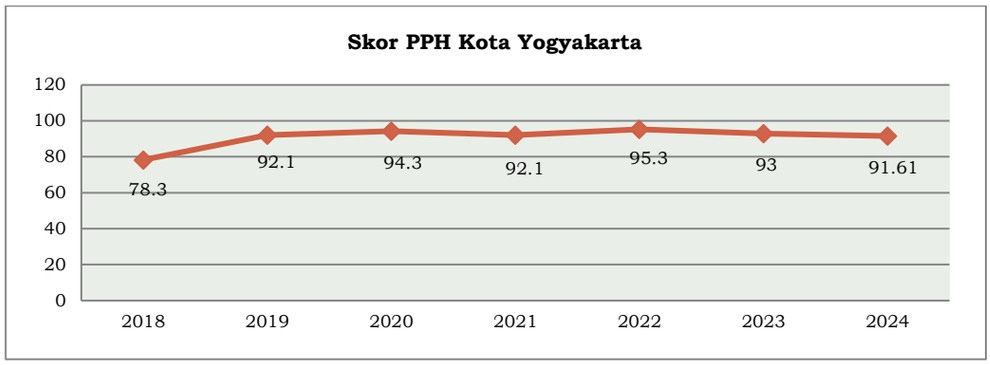

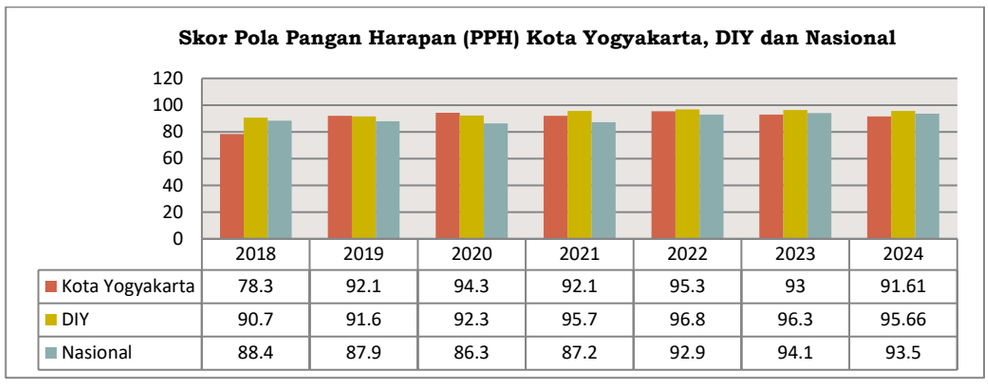

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Yogyakarta	78.3	92.1	94.3	92.1	95.3	93	91.61
DIY	90.7	91.6	92.3	95.7	96.8	96.3	95.66
Nasional	88.4	87.9	86.3	87.2	92.9	94.1	93.5

2) Angka Konsumsi Pangan

Pengambilan data atau survei untuk perhitungan Angka Konsumsi Pangan dilaksanakan secara mandiri. Angka konsumsi pangan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terukur sebesar 92,12 mengalami peningkatan skor sekitar 1%, dengan penentu 3 komponen pangan tertinggi yaitu berturut-turut komponen sayur dan buah, yakni 30,0 dengan skor faktual AKE sebesar 54,81, komponen padi-padian sebesar 25,0 dengan faktual AKE sebesar 25,46 dan komponen pangan hewani sebesar 24,0 dengan skor faktual AKE sebesar 59,75. Secara umum keberadaan komponen pangan hewani di seluruh wilayah baik tataran kemantren maupun kelurahan di Kota Yogyakarta tercatat dapat terpenuhi.

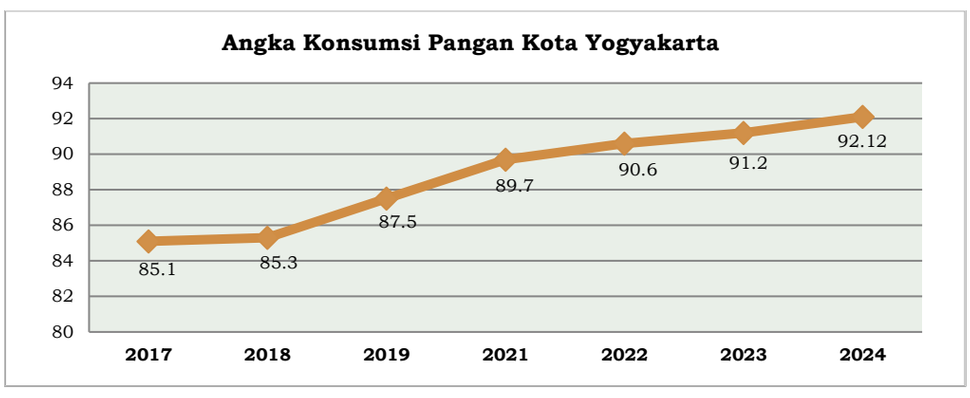

3) Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan

Tingkat kecukupan gizi penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Data SUSENAS tahun 2024 dapat dilihat dari konsumsi energi per hari dan konsumsi protein per hari. Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 1.863,47 kkal/kapita/hari yang sudah memenuhi tandar pelayanan minimal untuk kecukupan energi dengan 88,7% AKE. Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 64,96 gram/kapita/hari yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal untuk kecukupan protein sebesar 114% AKP.

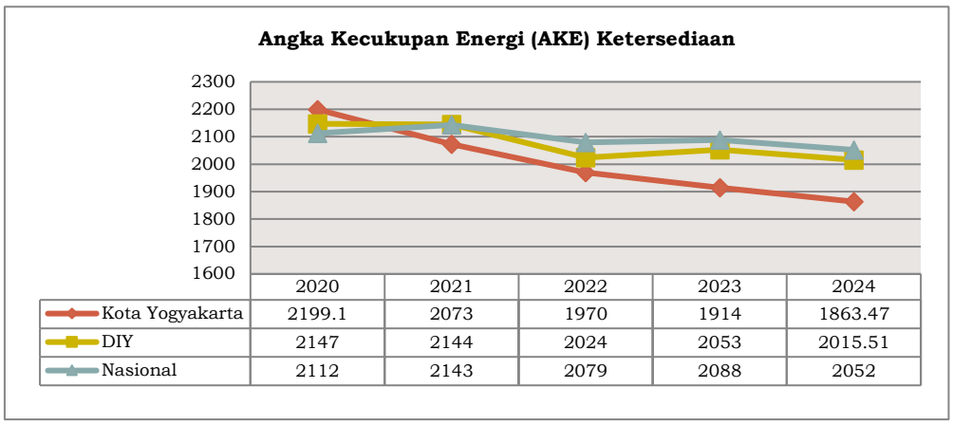

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Yogyakarta	2199.1	2073	1970	1914	1863.47
DIY	2147	2144	2024	2053	2015.51
Nasional	2112	2143	2079	2088	2052

4) Angka Ketersediaan Energi

Angka Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tetap Tahun 2024 adalah sebesar 2.773,73 kkal/kapita/hari, diantaranya 2.489,70 kkal/kap/hari atau 9,76 % berasal dari bahan pangan nabati dan 284,03 kkal/kap/hari atau 10,24 % berasal dari bahan pangan hewani. Angka Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tetap Tahun 2024 Kota Yogyakarta sudah melebihi rekomendasi WNPG XI yaitu sebesar 2.773,73 kkal/kapita/hari, diantaranya 2.489,70 kkal/kap/hari atau 89,76 % berasal dari ahan pangan nabati dan 284,03 kkal/kap/hari atau 10,24 % berasal dari bahan angan hewani. Sedangkan angka standart nasional berdasarkan Widyakarya Nasional angan dan Gizi XI Tahun 2018 (WNPG XI Tahun 2018) Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan rerata energi 2100 kkal.

Berdasarkan analis ketersediaan pangan dengan memperhitungkan produksi Kota Yogyakarta, semua komoditas pangan masih tidak dapat memenuhi kebutuhan. Namun apabila mempertimbangkan angka Ekspor dan Impor berasal dari distributor dan pedagang di pasar swalayan yang ada di Kota Yogyakarta ketersediaan bahan pangan sudah dapat dicukupi.

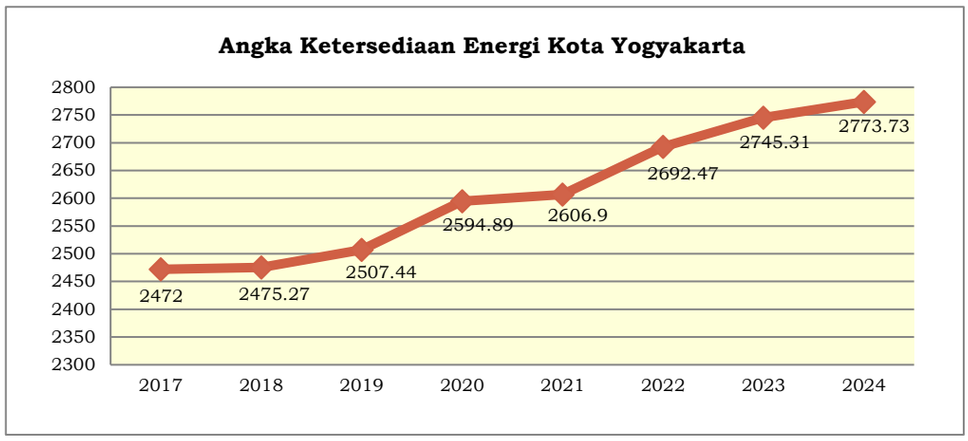

5) Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sesuai Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Kota Yogyakarta harus menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 47 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta sebesar 65,05 ton telah memenuhi jumlah cadangan pangan yang ditetapkan.

Tahun	Jumlah Pengadaan (ton)	Akumulasi (ton)
2019	2,00	2
2020	14,75	16.75
2021	15,00	31.75
2022	15,00	46,75
2023	18,30	65.05
2024	0	65.05

6) Wilayah Rawan Pangan Prioritas 2

Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024, tidak terdapat wilayah rawan pangan prioritas 2 di Kota Yogyakarta. Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 3 sebanyak 2 kelurahan dari 45 kelurahan (4,44%). Kelurahan prioritas 3 yaitu Kelurahan Bener dan Kelurahan Pakuncen. Kelurahan prioritas 4 sebanyak 13 kelurahan (28,89%); kelurahan prioritas 5 sebanyak 23 kelurahan (51,11%) dan kelurahan prioritas 6 sebanyak 7 kelurahan (15,56%). Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kemantren Tegalrejo (1 kelurahan) dan Kemantren Wirobrajan (1 kelurahan). Pada analisis FSVA tahun 2023 terdapat 3 kelurahan prioritas 3 yang kemudian pada analisis FSVA tahun 2024 turun menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bener dan Pakuncen, sedangkan kelurahan yang lain termasuk kelurahan tahan kerentanan dan kerawanan pangan prioritas 4, 5 dan 6.

7) Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Setelah menurun pada tahun 2023, jumlah sampel uji pengawasan mutu dan keamanan pangan baik yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun hasil perikanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan pada jumlah sampel yang tidak aman. Hal tersebut disebabkan karena produk pangan segar yang beredar di Kota Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta, sehingga proses distribusi yang menjembatani antara produsen dan konsumen harus dilakukan secara cepat dan mampu meminimalisir cemaran. Hal yang ditemukan adalah distribusi pangan segar belum memenuhi kriteria kemanan pangan, produk sayur yang didistribusikan menggunakan mobil bak terbuka dan kurang bersih. Produk pangan hasil perikanan terkendala dengan rantai dingin yang dapat menambah biaya produksi, dan produk pangan asal hewan yang merebak jualannya di pinggir jalan tanpa ada hygiene sanitasi yang memenuhi persyaratan.

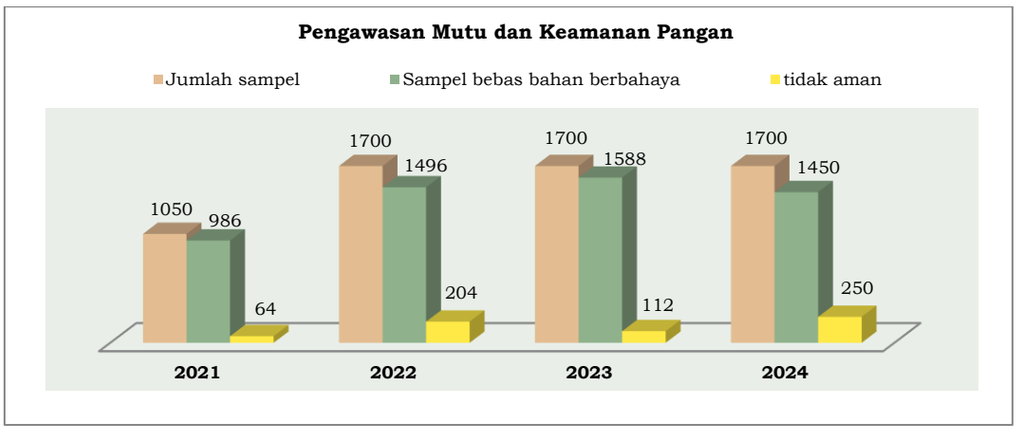

2. Urusan Pertanian
   a. Program yang dilaksanakan
      1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
      2) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
      3) Penyuluhan Pertanian
      4) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
      5) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   b. Capaian Kinerja
      1) Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani

      Pembinaan Kelompok Tani dilakukan melalui 14 orang penyuluh pertanian yang bertanggungjawab atas 1 WKPP Kemantren. Jumlah Kelompok tani di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana dalam kurun waktu 5 tahun dari 2020 meningkat dengan terbentuknya 53 kelompok tani yang baru, sehingga pada tahun 2024 seluruhnya terdapat 296 kelompok tani yang tersebar di 14 wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta.

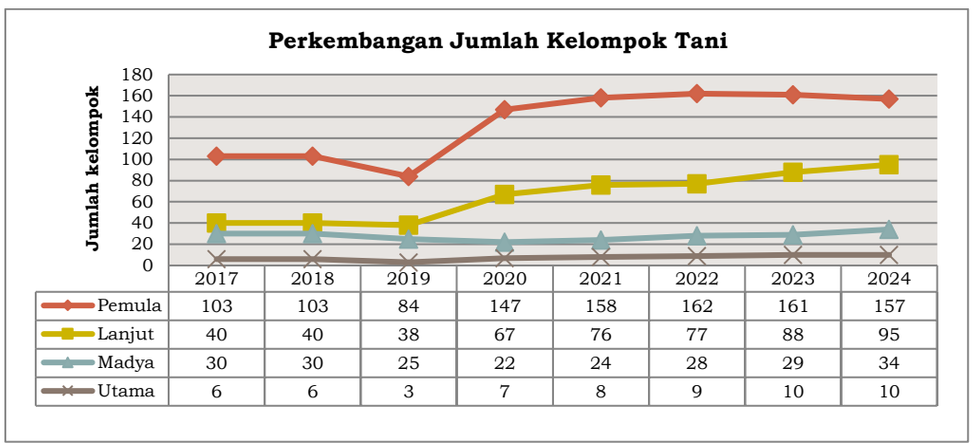

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemula	103	103	84	147	158	162	161	157
Lanjut	40	40	38	67	76	77	88	95
Madya	30	30	25	22	24	28	29	34
Utama	6	6	3	7	8	9	10	10

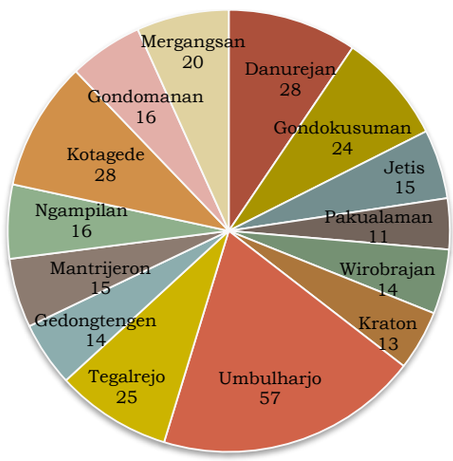

Persebaran Kelompok Tani di Wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan melalui penilaian kelas kelompok tani, setiap tahun jumlah kelompok kelas Lanjut, Madya dan Utama selalu mengalami peningkatan, sehingga kelompok tani pada kelas kelompok inilah yang bisa dikatakan sebagai kelompok yang aktif yang jumlahnya hanya sekitar 14,8% dari seluruh kelompok tani.

2) Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit hewan yang memiliki dampak signifikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat (zoonosis), maupun sosial. PHMS dapat menyebabkan kematian dan/atau kesakitan tinggi pada hewan, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Setiap tahun jumlah kasus PHMS selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 jumlah kasus PHMS mencapai 110 kasus, tahun 2023 tercatat ada 35 kasus, dan tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 0 kasus PHMS.

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program yang dilaksanakan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

2) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

b. Capaian Kinerja

1) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta tahun setiap tahun mengalami peningkatan meskipun kecil, karena karakter masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar adalah bukan pengkonsumsi ikan untuk makanan sehari-hari. Dibandingkan dengan realisasi tingkat Nasional, capaian AKI Kota Yogyakarta masih jauh dibawahnya, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian AKI tingkat Propinsi DIY.

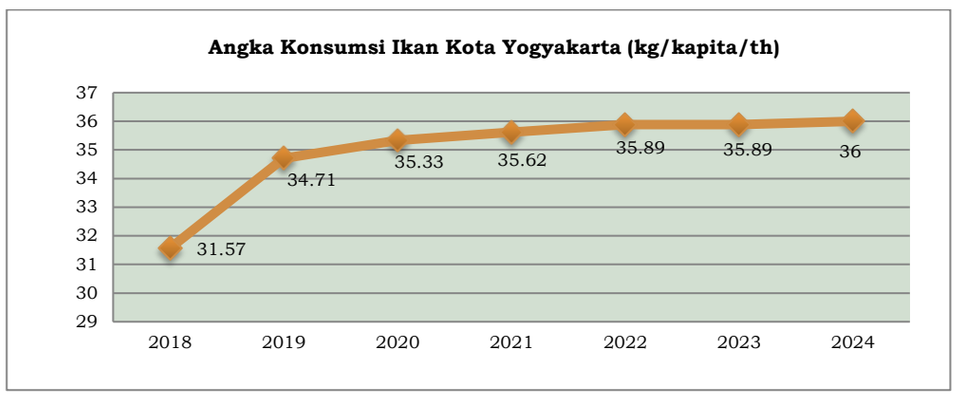

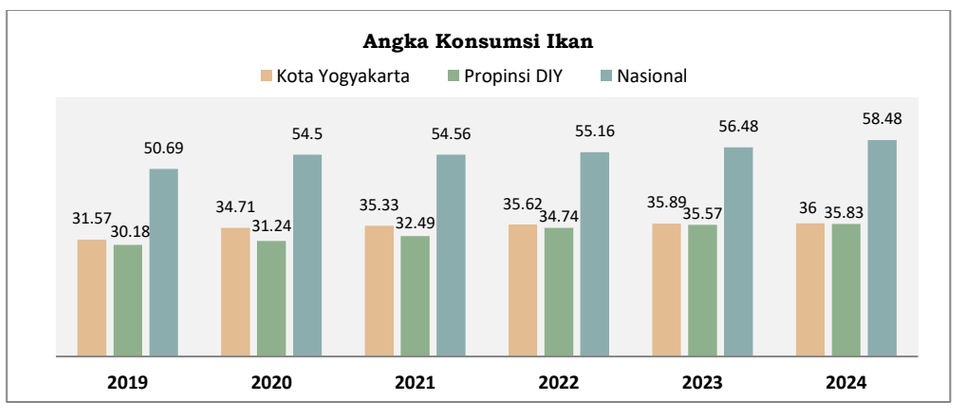

2) Meningkatnya Kelompok Perikanan

Perkembangan jumlah kelompok perikanan setiap tahun juga mengalami peningkatan, meskipun banyak kendala dan permasalahan di lapangan mengingat jumlah penyuluh perikanan bantuan dari pusat hanya 2 orang, dan karakteristik masyarakat perikanan di Kota Yogyakarta adalah bukan sebagai pelaku utama murni karena ketertarikan pada sektor perikanan hanya sebagai hobi atau sambilan dan bukan sebagai mata pencaharian yang utama.

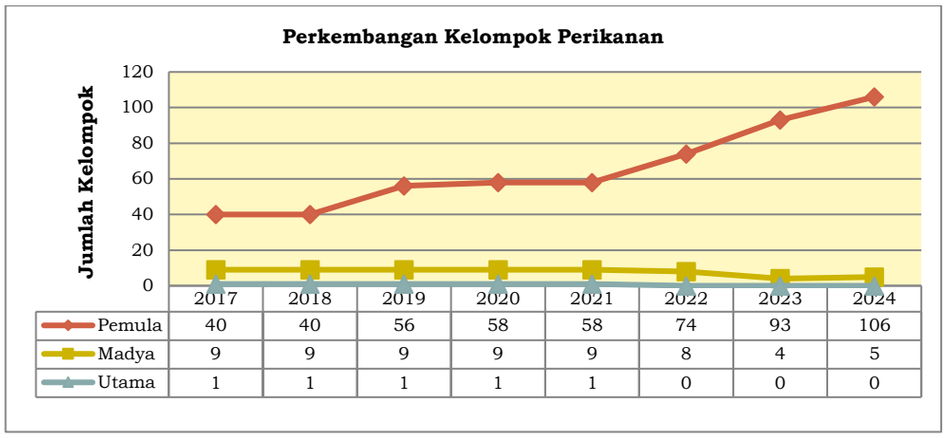

2.1.3.2. Capaian Pelaksanaan IKK

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, capaiannnnn atas pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Capaian Pelaksanaan IKK Perangkat Daerah 2020-2024

No	Indikator	Formulasi 2023	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Ada, 5 Gudang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	Ada penyaluran pangan	Tersalurkan	Tersalurkan	Tersalurkan	-
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	Tidak tersedia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	-	Ada, 4 Kegiatan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	-
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	Tersedia peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
6	Tertanganinya kerawanan pangan	-	Ada penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	-	Ada, Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan = 233 kali Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan = 1.645 kali	Ada kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksana	-
9	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	0	0	0	0	-
10	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ---------- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	-
11	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-	0	1	24	23	-

12	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemebrdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-	2 kelompok	15	29	33	-
13	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	-	77.955 benih	548000 ekor	266.100 ekor	292000 ekor	-
14	Sarana pertanian yang diberikan	-	3 lokasi	0	0	0	-
15	Prasarana pertanian yang digunakan	-	3 Gedung (BPP, Poliklinik, RPH)	25	26	25	-
16	Penerbitan izin usaha pertanian	-	0	0	0	0	-
17	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ---------- x 100% Jumlah Jumlah prasarana yang dibangun	100%	100%	100%	100%	-
18	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	-	0	0	0	0	-
19	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ---------- x 100% Luas area terkena bencana	100%	0	0	0	-
20	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	a = jumlah pupuk yang disalurkan b = target komisi (KP3) ditingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK a X = --------- x 100% b x c	4.05%	9.36%	2.10%	79.70%	-
21	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = ---------- x 100% RDKK	90.54%	50.27%	75.50%	71.69%	74.86 %
22	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ---------- x 100% Jumlah kejadian/ kasus hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	0.58%	24%	11.29%	68.20%	-100%
23	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100% Luas panen	6,8 ton/ha	6,8 ton/ha	5,8 ton/ha	5,8 ton/ha	6.8 ton/ha
24	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data:one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) ---------- x 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	10.126 kg	45672 kg	101.24%	103.50%	113.09%
25	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ---------- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	155%	109.18%	101.95%	115.02%	139.89 %

2.1.3.3. Capaian Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran OPD mengalami penurunan, disebabkan karena pada saat itu sedang terjadi wabah Covid-19, sehingga seluruh anggaran direfocussing untuk penanganan Covid-19. Seiring dengan menghilangnya wabah Covid-19, anggaran OPD terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan realisasi sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 pada realisasi belanja gaji dan tunjangan AS. Realisasi keuangan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak dapat terlaksana, yaitu pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 54,95 ton tidak dapat terealisasi disebabkan karena manajemen PT Taru Martani

sebagai pengelola CPPD sempat mengalami masalah internal, harga beras medium mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Peraturan Gubernur yang terbaru terkait dengan tata kelola, penyaluran, dan jumlah CPPD belum diterbitkan.

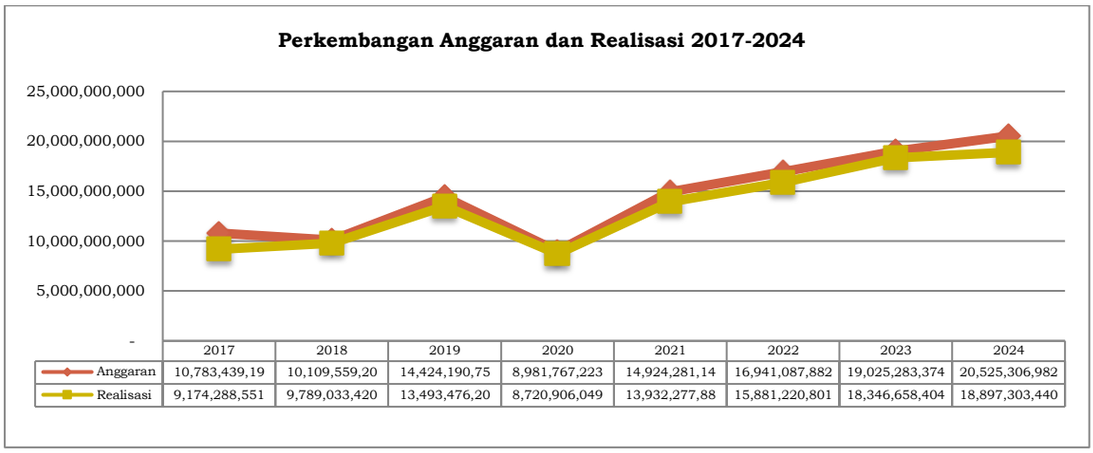

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	10,783,439,19	10,109,559,20	14,424,190,75	8,981,767,223	14,924,281,14	16,941,087,882	19,025,283,374	20,525,306,982
Realisasi	9,174,288,551	9,789,033,420	13,493,476,20	8,720,906,049	13,932,277,88	15,881,220,801	18,346,658,404	18,897,303,440

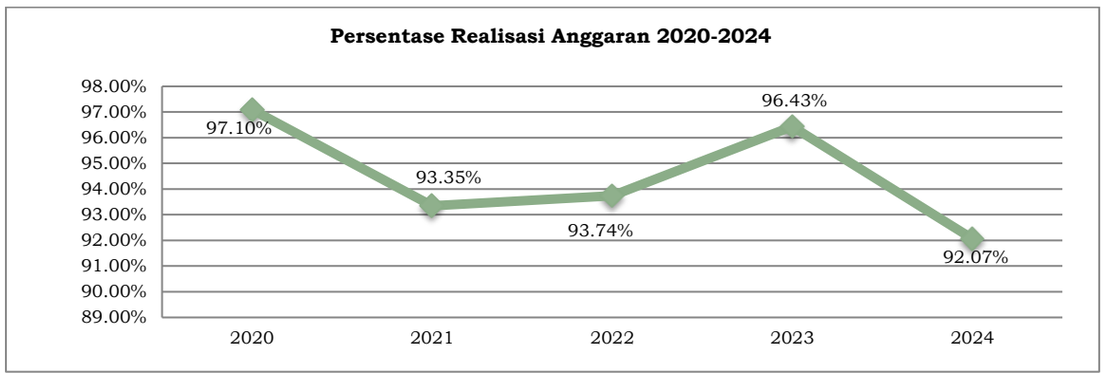

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pangan, pertanian dan perikanan, maka untuk mengidentifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dilakukan melalui evaluasi terhadap permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Identifikasi permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta :

1. Permasalahan Urusan Pangan :
   a. Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta hampir seluruhnya bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
   b. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
   c. Masih ditemui bahan pangan baik asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.
   d. Ketergantungan penyediaan pangan dari luar wilayah sangat tinggi karena Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah produsen dan lahan pangan pertanian semakin menurun.
   e. Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga masih ditemukan kasus rawan pangan dan rentan pangan.
   f. Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah produksi sehingga pangan segar yang dijual dan dikonsumsi masyarakat sebagian besar berasal dari luar wilayah, menyebabkan belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar yang ada sehingga diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif.

g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal.
h. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan B2SA belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.

2. Permasalahan Urusan Perikanan :
   a. Semakin berkurangnya kolam budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan.
   b. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana budidaya dan penerapan teknologi perikanan.
   c. Masih kurangnya tenaga teknis perikanan khususnya Penyuluh Perikanan.
   d. Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Permasalahan Urusan Pertanian :
   a. Laju penurunan luas lahan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan karena alih fungsi lahan yang sangat cepat.
   b. Pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan sebagian besar telah berusia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam mengakses permodalan serta teknologi.
   c. Kota Yogyakarta merupakan jalur lalulintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa.
   d. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
   e. Perkembangan urban farming belum optimal.
   f. Keterbatasan usaha pertanian dan peternakan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi;
   g. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan.
   h. Produktivitas pelaku usaha pertanian dan peternakan masih belum memadai.
   i. Masih lemahnya peran kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas dan manajemen pengelolaannya.

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi sesuai kondisi lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

Telaah Kebijakan Nasional. Visi pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dimana misi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah berikut:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama masyarakat yang adil dan makmur. untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modernuntuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi Kementerian Pertanian yaitu "Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani" dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sedang dalam tahap penyusunan dan penyesuaian dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga lain seperti Bappenas. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian, termasuk swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Fokus Utama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah :

1) Swasembada Pangan : meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup.
2) Peningkatan Kesejahteraan Petani : meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.
3) Pembangunan Pertanian Berkelanjutan : menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
4) Penguatan SDM Pertanian : meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan.
5) Pemanfaatan Teknologi : mendorong adopsi teknologi modern dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
6) Penguatan Kerjasama : meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional" dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada peningkatan pendapatan keluarga petani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, akan fokus pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan ekonomi biru. Renstra ini akan menjabarkan program-program prioritas KKP dalam mendukung visi dan misi Presiden, termasuk implementasi ekonomi biru, perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budidaya, dan pengelolaan sampah plastik di laut. Renstra KKP 2025 juga akan menekankan pada peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Beberapa poin penting dalam Renstra KKP 2025-2029 :

1) Ekonomi Biru: KKP akan melaksanakan program-program prioritas yang berlandaskan pada kebijakan ekonomi biru untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.
2) Konservasi Laut: Perluasan kawasan konservasi laut akan menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
3) Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
4) Perikanan Budidaya: Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat akan terus didorong.

5) Pengawasan dan Pengendalian: Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
6) Pengelolaan Sampah Plastik: Gerakan partisipasi nelayan dalam program Bulan Cinta Laut akan terus didukung untuk mengurangi sampah plastik di laut.
7) Kesejahteraan Nelayan: Peningkatan kesejahteraan nelayan akan menjadi prioritas melalui berbagai program yang mendukung peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Sama halnya dengan penyelarasan dengan RPJMN, penyelarasan dengan RPJMD DIY guna melihat kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang berkaitan dengan Kota Yogyakarta. Visi pembangunan DIY dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yaitu "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Adapun Misi pembangunan dalam RPJMD DIY 2022-2027, meliputi:

1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2) Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DIY adalah "Mewujudkan pertanian tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional" dengan sasaran peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah "Mewujudkan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera" dengan sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui peningkatan produksi perikanan dan berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya.

Visi yang dimuat dalam RPJMD bersumber dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran di KPUD pada saat pemilihan kepala daerah. Visi ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin diwujudkan dalam masa kepemimpinan lima tahun dan menjadi acuan penerjemahan ke dalam kebijakan yang lebih konkret sehingga menghasilkan dokumen pembangunan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Perumusan visi pembangunan Kota Yogyakarta juga mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, meliputi:

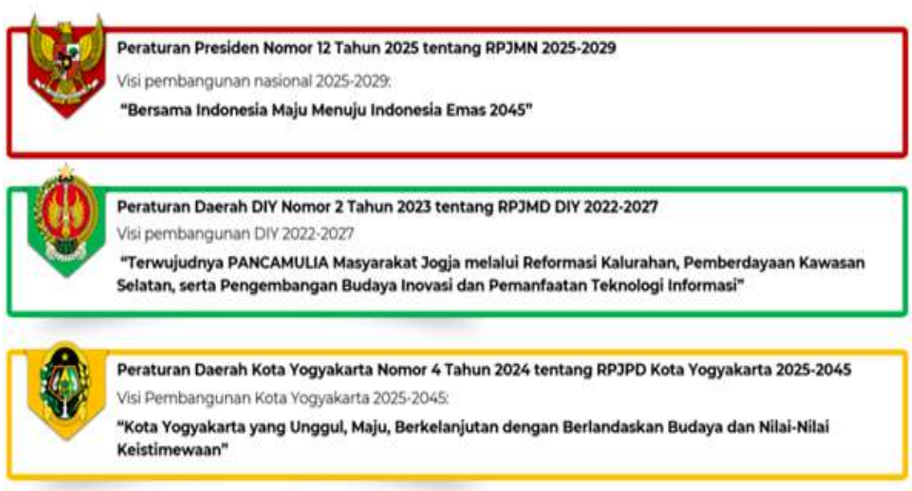

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan tersebut serta mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025 2029 sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan

amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Pembangunan Kota Yogyakarta hingga tahun 2029, yaitu “Adil Makmur”, “Lestari” dan “Berkeadaban”. Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Secara teknis, perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 dilakukan dengan menyinergikan misi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025 2045 dengan misi kepala daerah yang terpilih. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kesinambungan pembangunan, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 telah menetapkan empat Misi pembangunan sebagai penjabaran Visi, yaitu:

1) Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial;
2) Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan;
3) Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola Kesinambungan;
4) Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Di sisi lain, Wali Kota terpilih telah merumuskan enam Misi pembangunan yang termuat dalam dokumen resmi pendaftaran di KPUD sebagai janji politik bagi masyarakat, yang meliputi:

1) Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
2) Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup;
3) Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif;
4) Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
5) Menjalankan tata pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak rakyat;
6) Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Dengan mempertimbangkan aspek relevansi serta integrasi antara Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi Wali Kota terpilih, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi:

1) Misi 1: "Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan"
2) Misi 2: "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari"
3) Misi 3: "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal"
4) Misi 4: "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945"
5) Misi 5: “Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY”.

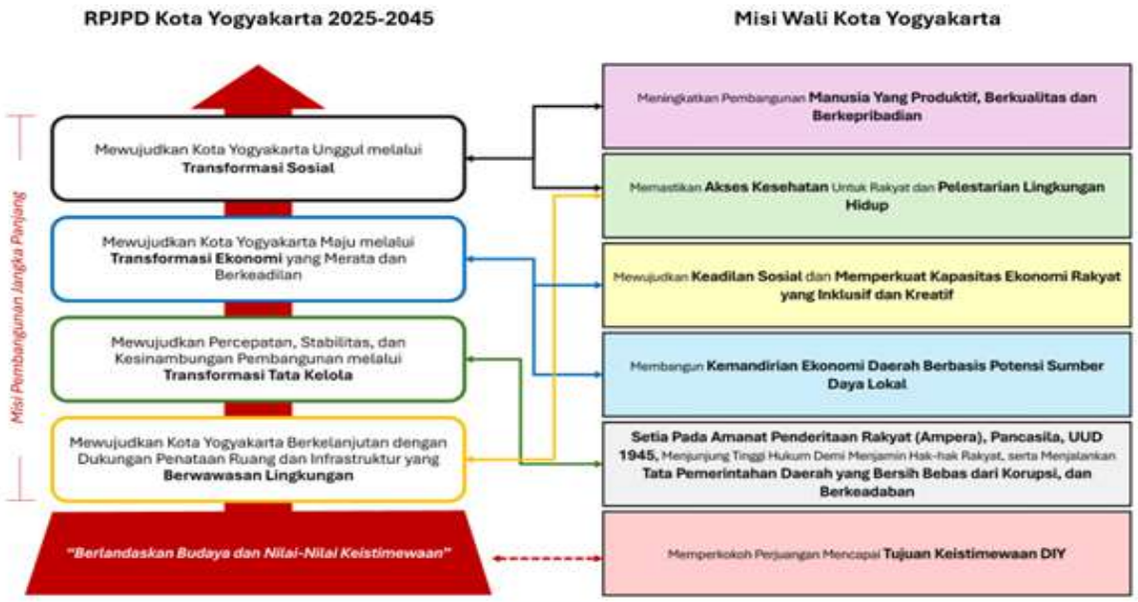

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Identifikasi isu strtategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesis isu antara isu pembangunan berkelanjutan serta mempertimbangkan permasalahan daerah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup Kota Yogyakarta, status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta gap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum tercapai.

Dari hasil sintesa diperoleh isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 berikut ini :

1) Pengelolaan persampahan yang belum optimal;
2) Penurunan kualitas dan kuantitas air;
3) Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik;
4) Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi;
5) Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi;
6) Belum optimalnya transportasi publik;
7) Kurangnya penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban.

2.2.2.2. Perumusan Isu Strategis

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Ketahanan Pangan	- Ketergantungan penyediaan pangan dari luar wilayah sangat tinggi karena Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah produsen dan lahan pangan pertanian semakin menurun. - Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman belum sepenuhnya dapat diimple-mentasikan.	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi.	- Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota	- Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan - Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana - Permasalahan ketahanan pangan khususnya masyarakat miskin dan rentan yang sulit memenuhi kebutuhan energi 2.745 kalori per hari.	- Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal - Kota Yogyakarta harus bekerja sama dengan kabupaten di sekitar yang memiliki cadangan pangan berlebih. - Pengembangan pekarangan pangan mandiri	- Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat. - Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pengawasan, untuk menjamin mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Sektor Pertanian	- Semakin berkurangnya kolam budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan. - Kota Yogyakarta merupakan jalur lalulintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa. - Ketimpangan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan.		- Disrupsi informasi, polarisasi soaial dan ketimpang an yang meningkat - Dampak Perubahan Iklim (DPI)	- Swasembada pangan - Pembangunan pertanian berkelanjutan - Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional		- Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosis) dan penyakit hewan menular strategis. - Pengembangan DPP sebagai pusat layanan perbenihan tanaman pisang dan hortikultura bersertifikat, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata agrobisnis - Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok pertanian dan peternakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.
Sektor Perikanan	- Laju penurunan luas lahan budidaya pertanian dan peternakan karena alih fungsi lahan yang sangat cepat.			- Ekonomi biru - Pengembangan perikanan budidaya		- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, terdapat beberapa isu penting di Kota Yogyakarta yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1) Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat.
2) Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pengawasannya, untuk menjamin mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.
3) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosis) dan penyakit hewan menular strategis.
4) Pengembangan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan tanaman pisang dan hortikultura bersertifikat, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata agrobisnis
5) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok pertanian dan peternakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.
6) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan serta mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Pembangunan Kota Yogyakarta hingga tahun 2029, yaitu "Adil Makmur", "Lestari" dan "Berkeadaban". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Dengan mempertimbangkan aspek relevansi serta integrasi antara Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi Wali Kota terpilih, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi:

1) Misi 1: "Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan"
2) Misi 2: "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari"
3) Misi 3: "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal"
4) Misi 4: "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945"
5) Misi 5: "Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY".

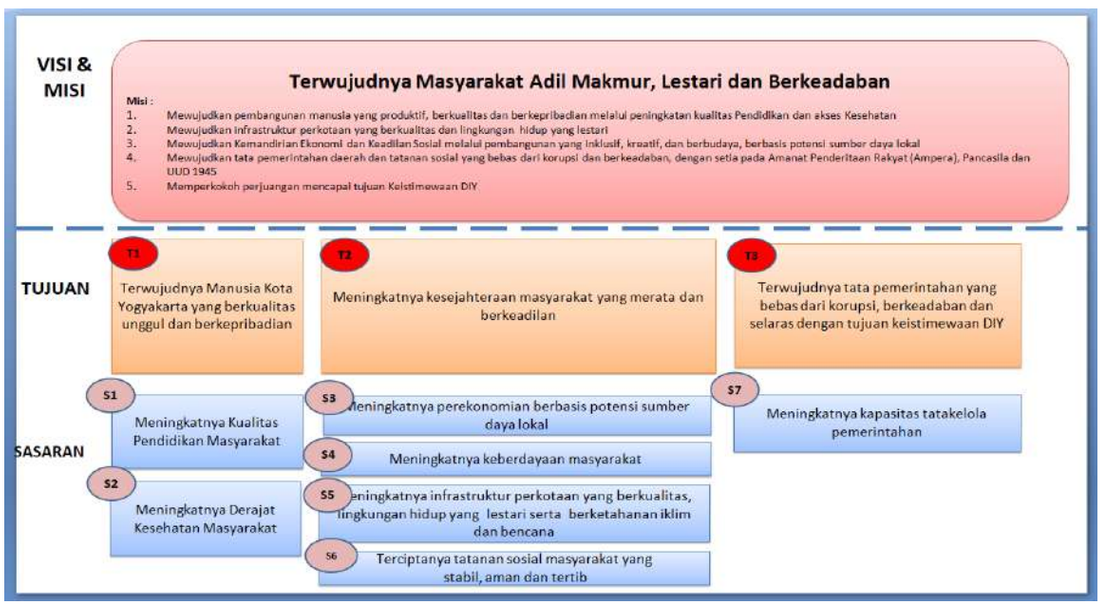

Dari ke-5 Misi Kota Yogyakarta tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Tujuan Strategis, dan dijabarkan kembali menjadi 7 (tujuh) Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian

   Memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Kota Yogyakarta :

   a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
   b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan

   Memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis Kota Yogyakarta :

   a) Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal.
   b) Meningkatnya keberdayaan masyarakat.
   c) Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana.
   d) Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib.

3. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY

   Memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis Kota Yogyakarta :

   e) Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan turut berkontribusi dan mendukung tercapainya Misi 3, yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, turut mendukung tercapainya Tujuan Daerah ke-2 yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan, dan turut mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Pertanian dan Pangan										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Produktivitas per hektar per tahun	Ton/Ha	5.8	5.9	6	6.15	6.3	6.5	6.7	
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persentase	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota)	Persentase	-100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persentase	113.09	99.62	99.69	99.77	99.85	99.92	100	

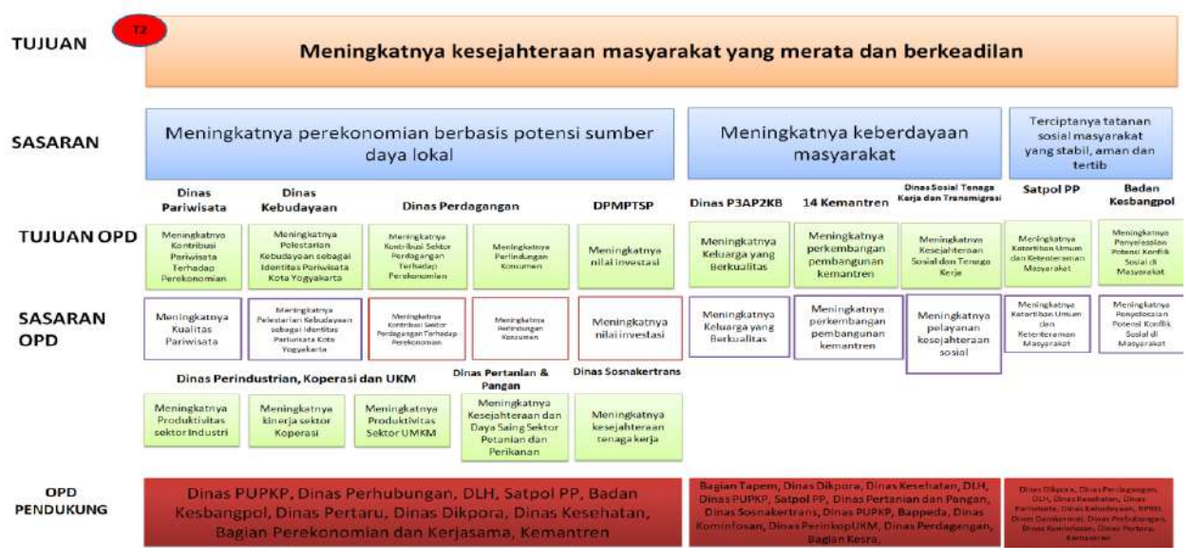

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menetapkan Tujuan Perangkat Daerah untuk Tahun 2025-2029 adalah :

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Yogyakarta.

Tujuan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%).
2. Nilai PDRB sektor pertanian (Rupiah).

Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang ditetapkan akan turut mendukung tercapainya Sasaran Daerah ke-3 yaitu Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dan Sasaran Daerah ke- 4 yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah. Sasaran Strategis yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan untuk Tahun 2025-2029 adalah :

1. **Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat**, dengan indikator kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. **Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan**, dengan indikator kinerja Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan (rupiah).
3. **Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif**, dengan indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mengurangi daerah rawan pangan dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat, serta habituasi B2SA.
2) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar dengan meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas asal tumbuhan, pangan segar asal hewan maupun pangan segar hasil perikanan yang beredar di Kota Yogyakarta..
3) Optimalisasi Urban Farming dengan penyuluhan pertanian.
4) Meningkatkan kesehatan hewan dan mengendalikan penyakit hewan menular strategis.
5) Meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan.
6) Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan memastikan penyediaan bahan baku dengan memperhatikan kualitas/kuantitasnya, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan.
7) Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat.
8) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa.
9) Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat miskin.
10) Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan promosi pemasaran produk pertanian dan perikanan.
11) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian dan perikanan.
12) Meningkatkan kualitas layanan, kapasitas sumber daya serta infrastruktur dan sarana prasarana obyek pendapatan dinas.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Pertanian dan Pangan											
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Yogyakarta		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Persentase)	10.35	11.00-9.00	10.65-8.65	10.30-8.30	9.95-7.95	9.60-7.60	9.25-7.25	
			Nilai PDRB sektor pertanian (Rp)	71,700,000,000	74,200,000,000	76,600,000,000	79,000,000,000	81,400,000,000	83,900,000,000	86,300,000,000	
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.		Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (Nilai)	91.61	92.11	92.61	93.11	93.61	94.11	94.61	
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal		Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan (Rupiah)	10,028,604,900	10,070,000,000	10,100,000,000	10,200,000,000	10,230,000,000	10,280,000,000	10,300,000,000	
			PAD Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp)	593,172,000	656,875,000	681,925,000	704,015,000	725,909,000	752,378,000	774,947,000	
Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan.		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan (Predikat)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan kelembagaan dan sarana prasarana kerja	Peningkatan kapasitas sumber daya	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan kelompok sasaran kegiatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan kelompok sasaran kegiatan, serta mempertajam integrasi pada program prioritas	Penyelesaian program pembangunan terintegrasi

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sesuai dengan arah kebijakan RPJMD, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Oleh karena itu dalam menentukan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 2025-2029 melalui strategi-strategi yang akan dilaksanakan dalam mendukung arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

1. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan, dilaksanakan melalui strategi :
   - Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat miskin.
2. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Kemanfaatan Pangan, dilaksanakan melalui strategi :
   - Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mengurangi daerah rawan pangan dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat, serta habituasi B2SA.
3. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan, dilaksanakan melalui strategi :
   - Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar dengan meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas asal tumbuhan, pangan segar asal hewan maupun pangan segar hasil perikanan yang beredar di Kota Yogyakarta.
4. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Pembinaan terhadap Pelaku Pertanian, dilaksanakan melalui strategi :
   - Optimalisasi Urban Farming dengan penyuluhan pertanian.
   - Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian.
5. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan, dilaksanakan melalui strategi :
   - Meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan.
   - Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan promosi pemasaran produk pertanian dan perikanan.
6. Arah Kebijakan RPJMD untuk Mempercepat Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis, dilaksanakan melalui strategi :
   - Meningkatkan kesehatan hewan dan mengendalikan penyakit hewan menular strategis.
   - Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa.
7. Arah Kebijakan RPJMD untuk Meningkatkan Pendayagunaan Aset Pertanian, Perikanan dan Kesehatan Hewan, dilaksanakan melalui strategi :
   - Meningkatkan kualitas layanan, kapasitas sumber daya serta infrastruktur dan sarana prasarana obyek pendapatan dinas.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan pangan.	
		Meningkatkan kemanfaatan pangan	Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan.	
			Meningkatkan fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan.	
			Menurunkan wilayah rawan pangan prioritas 3.	
		Meningkatkan mutu dan keamanan pangan	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.	
			Meningkatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan.	
			Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan.	
2.	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku pertanian	Meningkatkanpembinaan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian.	
			Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan.	
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelompok tani.	
			Meningkatkan kenaikan kelas kelompok tani.	
		Meningkatkan nilai produksi perikanan	Meningkatkan pembinaan Usaha Budidaya Ikan (UBI) di masyarakat.	
			Meningkatkan pengelolaan pembudidayaan ikan.	
			Meningkatkan pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan (UPI) di masyarakat.	
		Mempercepat penurunan kasus penyakit hewan menular strategis	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat hewan.	
			Meningkatkan cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan.	
			Meningkatkan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan.	
			Meningkatkan Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH.	
			Meningkatkan cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas.	
		Meningkatkan pendayagunaan aset pertanian, perikanan dan kesehatan hewan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk optimalisasi obyek pendapatan dinas.	
3	Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan.	Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Progam

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian. Dari hasil perumusan dan penjenjangan kinerja melalui penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir serta mengacu pada nomenklatur yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2025-2029 akan melaksanakan sebanyak 11 program yaitu :

a. Urusan Pangan mengampu 5 Program bidang teknis dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
    1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (hanya dilaksanakan pada Tahun 2025);
    2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
    3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
    4) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
    5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*; dan
    6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b. Urusan Kelautan dan Perikanan mengampu 2 Program, yaitu :
    1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
    2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
c. Urusan Pertanian mengampu 5 Program, yaitu :
    1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
    2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*;
    3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
    4) Program Penyuluhan Pertanian.
    5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program internal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas, secara urusan dimasukkan ke dalam urusan Pangan, karena urusan Pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Dinas. Disamping itu terdapat 1 Program yang dilaksanakan oleh 2 Urusan yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner* yang diampu oleh Urusan Pangan dimana sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan ketugasan pengawasan mutu dan keamanan pangan asal hewan dan hasil perikanan, dan Urusan Pertanian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan kesehatan hewan dan pengendalian PHMS dan zoonosis, serta terdapat 1 Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang hanya dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 saja, sedangkan mulai tahun 2026 dan seterusnya program tersebut tidak dilaksanakan lagi karena adanya pembaharuan nomenklatur program dan kegiatan.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta akan mendukung tercapainya Tujuan yaitu :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kota Yogyakarta

serta 3 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Pertanian dan Pangan							
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Yogyakarta				Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		
					Nilai PDRB sektor pertanian		
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.		Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat			Pola Pangan Harapan		
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terkelolanya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Meningkatnya Kemanfaatan Pangan		Angka Konsumsi Energi	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya Kemanfaatan Pangan		Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Menurunnya wilayah rawan pangan prioritas 3	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal		Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan			Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan		
					PAD Sektor Pertanian dan Perikanan		
			Meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis		Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya capaian UBI yang terbina	Persentase UBI yang terbina	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya pendayagunaan aset perikanan		PAD perikanan	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Produksi Benih Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis		Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

				Meningkatnya pembinaan UPI	Persentase cakupan pembinaan UPI	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian		Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Meningkatnya pendayagunaan aset pertanian		PAD pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo dan Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Meningkatnya pengawasan peredaran obat hewan		Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat hewan	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
			Terkendalinya wabah PHMS		Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan		PAD kesehatan hewan	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Meningkatnya jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlayaninya Pemotongan Hewan di RPH yang menerapkan persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis		Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

				Meningkatnya pengendalian bencana zoonosis	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3.27.05.2.01.0004 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
			Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian		Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan.		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif			Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan		Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.09.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.09.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.09.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya jumlah Lumbung Mataraman yang dikembangkan		Jumlah Lumbung Mataraman yang Dikembangkan	2.22.08. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya kapasitas dan kualitas Kebun Bibit Inti Plasma Nutfah Pisang	Pengembangan Kebun Bibit Inti Plasma Nutfah Pisang	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2.22.08.5.06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman	

4.2 Uraian Kegiatan

Berdasarkan uraian Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, maka dari 12 program tersebut akan dijabarkan ke dalam 26 Kegiatan yang terdiri atas 18 Kegiatan pada urusan teknis dan 8 Kegiatan pada urusan penunjang. Dari 26 Kegiatan yang akan dilaksanakan, terdapat 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** yang diampu oleh 2 urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pertanian. Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana rincian berikut :

a. Urusan Pangan :

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan :

- Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (hanya dilaksanakan pada Tahun 2025).

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi

Pasokan dan Harga Pangan.

- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan :
   - Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan :
   - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
   - Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**.
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Urusan Kelautan dan Perikanan :
   1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya :
      - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
      - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
   2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
      - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

c. Urusan Pertanian :
   1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :
      - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
      - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
      - Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer.
   2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
      - Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.
      - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**.
   3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian :
      - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.
   4) Program Penyuluhan Pertanian :
      - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
   5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
      - Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Setelah diuraikan seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2025-2029, maka selanjutnya dari program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.2 di bawah.

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Setelah menguraikan seluruh penjabaran Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, selanjutnya dilakukan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas, yang akan mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3 di bawah.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra 2025-2029

NO	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Pertanian dan Pangan					
1.	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	2.09.03 – Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
2.	Pemajuan Ekonomi Kreatif	3.25.06 – Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
3.	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	3.27.04 – Program Pengemdalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
				3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
4.	Pemajuan Ekonomi Kreatif	3.27.05 – Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				3.27.05.2.01.0004 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
5.	Pemajuan Ekonomi Kreatif	3.27.07 – Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.1.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	27 kelurahan	28 kelurahan	291,052,000	0		0		0		0		0	
1.1.1.1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	27 kelurahan	28 kelurahan	291,052,000	0		0		0		0		0	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Unit	1 Unit	291,052,000	0		0		0		0		0	
1.1.2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	2773.73 kkal/kapita/ hari	2775.43 kkal/kapita/ hari	552,252,598	2777.13 kkal/kapita/ hari	1,034,941,434	2778.83 kkal/kapita/ hari	1,045,290,846	2780.53 kkal/kapita/ hari	1,055,743,754	2782.23 kkal/kapita/ hari	1,066,301,191	2783.93 kkal/kapita/ hari	1,076,964,203
1.1.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	3.37%	3.37%	92,550,288	3.37%	639,707,924	3.38%	646,105,002	3.38%	652,566,052	3.39%	659,091,712	3.39%	665,682,629
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	2400 Keluarga	271,474,100	2400 Keluarga	274,188,841	2400 Keluarga	276,930,729	2400 Keluarga	279,700,036	2400 Keluarga	282,497,037
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	271,050,000	1 Laporan	273,760,500	1 Laporan	276,498,105	1 Laporan	279,263,086	1 Laporan	282,055,716
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,612,464	1 Dokumen	17,660,464	1 Dokumen	17,837,068	1 Dokumen	18,015,439	1 Dokumen	18,195,593	1 Dokumen	18,377,549
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0	1 Dokumen	6,837,464	0		0		0		0		0	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	75,100,360	1 Dokumen	79,523,360	1 Dokumen	80,318,593	1 Dokumen	81,121,779	1 Dokumen	81,932,997	1 Dokumen	82,752,327
1.1.2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	100%	100%	124,665,000	100%	16,730,000	100%	16,897,300	100%	17,066,273	100%	17,236,935	100%	17,409,305
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	65.05 Ton	65.05 Ton	124,665,000	65.05 Ton	16,730,000	65.05 Ton	16,897,300	65.05 Ton	17,066,273	65.05 Ton	17,236,935	65.05 Ton	17,409,305

1.1.2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan	13.57%	13.57%	335,037,310	14.02%	378,503,510	14.48%	378,503,510	14.93%	386,111,429	15.38%	389,972,544	15.83%	393,872,269
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	44,427,360	1 Dokumen	88,732,760	1 Dokumen	89,620,087	1 Dokumen	90,516,287	1 Dokumen	91,421,451	1 Dokumen	92,335,665
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaraga-man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	3 Laporan	290,609,950	3 Laporan	289,770,750	3 Laporan	292,668,457	3 Laporan	295,595,142	3 Laporan	298,551,093	3 Laporan	301,536,604
1.1.3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	95.56%	95.56%	114,962,336	95.56%	123,813,336	95.56%	125,051,469	97.78%	126,301,984	97.78%	127,565,003	97.78%	128,840,653
1.1.3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	2 kelurahan	2 kelurahan	114,962,336	2 kelurahan	123,813,336	2 kelurahan	125,051,469	1 kelurahan	126,301,984	1 kelurahan	127,565,003	1 kelurahan	128,840,653
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	114,962,336	1 Dokumen	123,813,336	1 Dokumen	125,051,469	1 Dokumen	126,301,984	1 Dokumen	127,565,003	1 Dokumen	128,840,653
1.1.4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	69.78%	70.04%	430,020,020	70.31%	289,101,720	70.58%	292,032,736	70.84%	294,983,063	71.11%	297,952,894	71.38%	300,942,423
1.1.4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	35.40%	37.17%	430,020,020	38.94%	289,101,720	40.71%	292,032,736	42.48%	294,983,063	44.25%	297,952,894	46.02%	300,942,423
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	122,106,040	1 Dokumen	14,327,290	1 Dokumen	14,470,562	1 Dokumen	14,615,268	1 Dokumen	14,761,421	1 Dokumen	14,909,035
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	49,723,380	1 Dokumen	49,048,930	1 Dokumen	49,539,419	1 Dokumen	50,034,813	1 Dokumen	50,535,161	1 Dokumen	51,040,513
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	125,269,000	1 Dokumen	129,725,500	1 Dokumen	131,022,755	1 Dokumen	132,332,982	1 Dokumen	133,656,312	1 Dokumen	134,992,875
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	132,921,600	1 Dokumen	96,000,000	1 Dokumen	97,000,000	1 Dokumen	98,000,000	1 Dokumen	99,000,000	1 Dokumen	100,000,000

1.1.5. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	84.17%	84.58%	716,763,830	85.00%	606,347,032	85.42%	612,410,502	85.83%	618,534,606	86.25%	624,719,952	86.67%	630,967,151
1.1.5.1. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)	31.24%	31.93%	474,498,680	32.63%	353,693,207	33.33%	357,230,139	34.03%	360,802,440	34.73%	364,410,464	35.43%	368,054,569
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	24 Laporan	24 Laporan	474,498,680	8 Laporan	353,693,207	8 Laporan	357,230,139	8 Laporan	360,802,440	8 Laporan	364,410,464	8 Laporan	368,054,569
1.1.5.2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan	0 dokumen	1 dokumen	241,965,150	1 dokumen	252,653,825	1 dokumen	255,180,363	1 dokumen	257,732,166	1 dokumen	260,309,488	1 dokumen	262,912,582
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	24 Dokumen	24 Dokumen	200,685,050	24 Dokumen	209,676,325	24 Dokumen	211,773,088	24 Dokumen	213,890,819	24 Dokumen	216,029,727	24 Dokumen	218,190,024
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	41,280,100	4 Unit Usaha	42,977,500	4 Unit Usaha	43,407,275	4 Unit Usaha	43,841,347	4 Unit Usaha	44,279,761	4 Unit Usaha	44,722,558
1.2.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis	8.00%	10.00%	700,534,550	12.00%	1,002,064,700	14.00%	1,012,085,347	16.00%	1,022,206,199	18.00%	1,032,428,261	20.00%	1,042,752,544
	PAD perikanan	Rp 58,159,000	Rp 90,200,000		Rp100,000,000		Rp105,000,000		Rp110,000,000		Rp115,000,000		Rp120,000,000	
1.2.1.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase UBI yang terbina	53.00%	60.00%	198,274,800	65.00%	231,026,700	70.00%	233,336,967	80.00%	235,670,336	90.00%	238,027,039	100.00%	240,407,310
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	75 Kelompok	77 Kelompok	130,694,000	49 Kelompok	133,135,500	54 Kelompok	134,466,855	59 Kelompok	135,811,523	64 Kelompok	137,169,638	69 Kelompok	138,541,335
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	7 Kelompok	67,580,800	31 Kelompok	97,891,200	31 kelompok	98,870,112	31 kelompok	99,858,813	31 kelompok	100,857,401	31 kelompok	101,865,975
1.2.1.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produksi Benih Ikan	128.480 ekor	257.200 ekor	502,259,750	281.240 ekor	771,038,000	288.700 ekor	778,748,380	299.650 ekor	786,535,863	311.300 ekor	794,401,222	324.180 ekor	802,345,234
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	502,259,750	3 Unit	771,038,000	3 Unit	778,748,380	3 Unit	786,535,863	3 Unit	794,401,222	3 Unit	802,345,234

1.2.2. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis	19.05%	28.57%	210,542,680	38.10%	101,103,500	47.62%	102,114,535	57.14%	103,135,680	66.67%	104,167,037	76.19%	105,208,707
1.2.2.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase cakupan pembinaan UPI	23.81%	33.33%	210,542,680	42.86%	101,103,500	57.14%	102,114,535	71.43%	103,135,680	85.71%	104,167,037	100.00%	105,208,707
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	19 Unit Usaha	19 Unit Usaha	210,542,680	20 Unit Usaha	101,103,500	21 Unit Usaha	102,114,535	22 Unit Usaha	103,135,680	23 Unit Usaha	104,167,037	25 Unit Usaha	105,208,707
1.2.3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan	100%	100%	1,470,431,352	100%	1,278,802,841	100%	1,291,590,869	100%	1,304,506,777	100%	1,317,551,843	100%	1,330,727,361
	PAD pertanian	Rp128,326,000	Rp152,250,000		Rp154,250,000		Rp155,250,000		Rp156,250,000		Rp160,250,000		Rp161,250,000	
1.2.3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	100%	7,420,300	100%	3,230,000	100%	3,262,300	100%	3,294,923	100%	3,327,872	100%	3,361,150
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	7,420,300	1 Laporan	3,230,000	1 Laporan	3,262,300	1 Laporan	3,294,923	1 Laporan	3,327,872	1 Laporan	3,361,150
1.2.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo	13.000 kg	19.500 kg	1,430,502,052	19.500 kg	1,261,632,841	19.500 kg	1,274,249,169	19.500 kg	1,286,991,660	19.500 kg	1,299,861,576	19. 500 kg	1,312,860,192
	Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	6.340 batang	6.438 batang		6.456 batang		6.654 batang		6.738 batang		6.814 batang		7.121 batang	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	4 Dokumen	0	1 Dokumen	34,029,000	1 Dokumen	34,369,290	1 Dokumen	34,712,982	1 Dokumen	35,060,112	1 Dokumen	35,410,713
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	327 Varietas Unggul Baru (VUB)	337 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,378,515,252	336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,227,603,841	336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,239,879,879	336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,252,278,678	336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,264,801,464	336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,277,449,479
	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	20.00%	21.00%		22.00%		23.00%		24.00%		25.00%		26.00%	

1.2.3.3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	76.67%	83.33%	32,509,000	86.67%	13,940,000	90.00%	14,079,400	93.33%	14,220,194	96.67%	14,362,395	100.00%	14,506,019
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan	32,509,000	4 Laporan	13,940,000	4 Laporan	14,079,400	4 Laporan	14,220,194	4 Laporan	14,362,395	4 Laporan	14,506,019
1.2.5. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	PAD kesehatan hewan	Rp406,687,000	Rp414,425,000		Rp427,675,000		Rp443,765,000		Rp459,659,000		Rp477,128,000		Rp493,697,000	
1.2.5.1. Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	100%	100%	126,420,200	100%	88,119,000	100%	89,000,190	100%	89,890,191	100%	90,789,093	100%	91,696,984
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	14 Wilayah	14 Wilayah	126,420,200	14 Wilayah	88,119,000	14 Wilayah	89,000,190	14 Wilayah	89,890,191	14 Wilayah	90,789,093	14 Wilayah	91,696,984
1.2.5.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	42,364	42,606	293,729,385	43,825	270,734,500	45,479	273,441,845	47,254	276,176,263	49,462	278,938,026	51,522	281,727,406
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	293,729,385	12 Laporan	270,734,500	12 Laporan	273,441,845	12 Laporan	276,176,263	12 Laporan	278,938,026	12 Laporan	281,727,406
1.2.5.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH	2	2	412,552,250	2	449,556,250	2	454,051,812	2	458,592,330	2	463,178,253	2	467,810,036
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	412,552,250	12 Laporan	449,556,250	12 Laporan	454,051,812	12 Laporan	458,592,330	12 Laporan	463,178,253	12 Laporan	467,810,036
1.2.6. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	100%	100%	200,973,000	100%	144,568,000	100%	146,013,680	100%	147,473,816	100%	148,948,554	100%	150,438,040
1.2.6.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	100%	100%	200,973,000	100%	144,568,000	100%	146,013,680	100%	147,473,816	100%	148,948,554	100%	150,438,040
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan	200,973,000	1 laporan	144,568,000	1 laporan	146,013,680	1 laporan	147,473,816	1 laporan	148,948,554	1 laporan	150,438,040

1.2.7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	20.27%	21.28%	820,545,300	22.30%	563,421,500	23.31%	569,055,715	24.32%	574,746,271	25.34%	580,493,733	26.35%	586,298,671
1.2.7.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	6.60%	6.76%	820,545,300	7.09%	563,421,500	7.43%	569,055,715	7.77%	574,746,271	8.11%	580,493,733	8.45%	586,298,671
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	195,272,300	1 Unit	54,993,000	1 Unit	55,542,930	1 Unit	56,098,359	1 Unit	56,659,342	1 Unit	57,225,936
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	581,094,000	5 Unit	408,451,000	5 Unit	412,535,510	6 Unit	416,660,865	6 Unit	420,827,473	6 Unit	425,035,748
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	58 Unit	59 Unit	44,179,000	60 Unit	99,977,500	61 Unit	100,977,275	62 Unit	101,987,047	63 Unit	103,006,918	64 Unit	104,036,987
2.22.08. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lumbung Mataraman yang Dikembangkan	-	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000
2.22.08.5.06, Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Kebun Bibit Inti Plasma Nutfah Pisang	-	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000
Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	-	1 laporan	300.000.000	1 laporan	2.500.000.000	1 laporan	2.500.000.000	1 laporan	2.500.000.000	1 laporan	2.500.000.000	1 laporan	2.500.000.000
1.3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	A (88,49)	A (88,5-89,5)	13,474,629,973	A (89,0-90,5)	12,301,892,062	A (89,5-91,0)	12,297,915,101	A (90,0-91,5)	12,866,858,948	AA (90,5-92,0)	13,205,075,729	AA (91,0-92,5)	13,449,135,688
	Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan	4.537	4.54		4.56		4.58		4.6		4.62		4.64	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan	82.1	82.6		83.1		83.6		84.1		84.6		85.1	
1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan	100%	100%	35,110,000	100%	17,065,616	100%	17,236,272	100%	17,408,632	100%	17,582,717	100%	17,758,544
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8,660,000	3 Dokumen	1,965,000	3 Dokumen	1,984,650	3 Dokumen	2,004,496	3 Dokumen	2,024,541	3 Dokumen	2,044,786
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	1,215,000	1 Dokumen	1,227,150	1 Dokumen	1,239,421	1 Dokumen	1,251,815	1 Dokumen	1,264,333

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	1,275,000	1 Dokumen	1,287,750	1 Dokumen	1,300,627	1 Dokumen	1,313,633	1 Dokumen	1,326,770
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,130,000	1 Dokumen	1,215,000	1 Dokumen	1,227,150	1 Dokumen	1,239,421	1 Dokumen	1,251,815	1 Dokumen	1,264,333
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,530,000	1 Dokumen	1,155,000	1 Dokumen	1,166,550	1 Dokumen	1,178,215	1 Dokumen	1,189,997	1 Dokumen	1,201,897
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	14,605,000	6 Laporan	9,380,616	6 Laporan	9,474,422	6 Laporan	9,569,166	6 Laporan	9,664,858	6 Laporan	9,761,506
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3,585,000	2 laporan	860,000	2 laporan	868,600	2 laporan	877,286	2 laporan	886,058	2 laporan	894,919
1.3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	5	5	10,455,494,653	5	9,378,290,900	5	9,578,514,750	5	9,978,974,597	5	10,079,484,543	5	10,280,214,588
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10,370,410,653	78 Orang/bulan	9,300,000,000	78 Orang/bulan	9,500,000,000	80 Orang/bulan	9,900,000,000	82 Orang/bulan	10,000,000,000	82 Orang/bulan	10,200,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	75,654,000	12 Dokumen	75,825,900	12 Dokumen	75,900,000	12 Dokumen	76,200,000	12 Dokumen	76,500,000	12 Dokumen	77,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2,370,000	12 Dokumen	665,000	12 Dokumen	671,650	12 Dokumen	678,366	12 Dokumen	685,150	12 Dokumen	692,001
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,530,000	1 Laporan	310,000	1 Laporan	313,100	1 Laporan	316,231	1 Laporan	319,393	1 Laporan	322,587

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000	1 Dokumen	295,000	1 Dokumen	350,000	1 Dokumen	400,000	1 Dokumen	450,000	1 Dokumen	500,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2,940,000	12 Laporan	915,000	12 Laporan	950,000	12 Laporan	1,000,000	12 Laporan	1,100,000	12 Laporan	1,200,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,440,000	1 Dokumen	280,000	1 Dokumen	330,000	1 Dokumen	380,000	1 Dokumen	430,000	1 Dokumen	500,000
1.3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	5	5	12,075,000	5	5,280,000	5	5,332,800	5	5,386,128	5	5,439,987	5	5,494,388
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,725,000	2 Dokumen	550,000	2 Dokumen	555,500	2 Dokumen	561,055	2 Dokumen	566,665	2 Dokumen	572,332
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	550,000	1 Dokumen	555,500	1 Dokumen	561,055	1 Dokumen	566,665	1 Dokumen	572,332
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6,325,000	12 Laporan	3,630,000	12 Laporan	3,666,300	12 Laporan	3,702,963	12 Laporan	3,739,992	12 Laporan	3,777,392
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1,725,000	2 Laporan	550,000	2 Laporan	555,500	2 Laporan	561,055	2 Laporan	566,665	2 Laporan	572,332
1.3.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan	85.3	85.4	9100000	85.5	3,400,000	85.6	3,434,000	85.7	3,468,340	85.8	3,503,023	85.9	3,538,053
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3 Dokumen	9100000	2 Dokumen	3,400,000	2 Dokumen	3,434,000	2 Dokumen	3,468,340	2 Dokumen	3,503,023	2 Dokumen	3,538,053
1.3.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan	85.7	86	208,397,320	86.3	169,903,346	86.6	171,602,379	86.9	173,318,402	87.2	175,051,583	87.5	176,802,100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20,925,000	1 Paket	15,773,300	1 Paket	15,931,033	1 Paket	16,090,343	1 Paket	16,251,246	1 Paket	16,413,759
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	77,372,120	4 Paket	52,457,046	4 Paket	52,981,616	4 Paket	53,511,432	4 Paket	54,046,546	4 Paket	54,587,012
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	32,637,200	1 Paket	14,813,000	1 Paket	14,961,130	1 Paket	15,110,741	1 Paket	15,261,848	1 Paket	15,414,467
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14,208,000	2 Paket	10,900,000	2 Paket	11,009,000	2 Paket	11,119,090	2 Paket	11,230,280	2 Paket	11,342,583
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,920,000	2 Dokumen	1,920,000	2 Dokumen	1,939,200	2 Dokumen	1,958,592	2 Dokumen	1,978,177	2 Dokumen	1,997,959
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	81 Laporan	61,335,000	70 Laporan	74,040,000	70 Laporan	74,780,400	70 Laporan	75,528,204	70 Laporan	76,283,486	70 Laporan	77,046,320
1.3.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	5	5	78,800,000	5	300,000,000	5	70,000,000	5	100,000,000	5	115,000,000	5	125,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	12,500,000	0 Unit	0	1 unit	20,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	35,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51 Unit	9 unit	66,300,000	1 Unit	300,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	75,000,000	1 unit	85,000,000	1 unit	90,000,000
1.3.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan	100%	100%	1,714,586,000	100%	1,887,062,200	100%	1,888,636,000	100%	1,892,672,360	100%	1,903,709,083	100%	1,913,746,174
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	12 Laporan	3,600,000	12 Laporan	3,636,000	12 Laporan	3,672,360	12 Laporan	3,709,083	12 Laporan	3,746,174
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1,710,986,000	4 Laporan	1,883,462,200	4 Laporan	1,885,000,000	4 Laporan	1,889,000,000	4 Laporan	1,900,000,000	4 Laporan	1,910,000,000
1.3.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	5	5	961,067,000	5	540,890,000	5	563,158,900	5	695,630,489	5	905,304,793	5	926,581,841

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26,890,000	1 Unit	26,890,000	1 Unit	27,158,900	1 Unit	27,430,489	1 Unit	27,704,793	1 Unit	27,981,841
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	34 Unit	201,035,000	35 Unit	150,000,000	35 Unit	150,500,000	35 Unit	160,000,000	35 Unit	199,000,000	35 Unit	199,500,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	6 Unit	12,000,000	0 Unit	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	1,200,000	1 Unit	1,400,000	1 Unit	1,600,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	89 Unit	61,442,000	56 Unit	46,000,000	56 Unit	46,500,000	56 Unit	47,000,000	56 Unit	57,200,000	56 Unit	57,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	4 Unit	289,700,000	2 Unit	200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	230,000,000	1 Unit	280,000,000	1 Unit	290,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	370,000,000	1 Unit	118,000,000	1 Unit	128,000,000	1 Unit	230,000,000	1 Unit	340,000,000	1 Unit	350,000,000
TOTAL OPD				**19,815,109,474**		**18,254,465,875**		**18,310,054,647**		**18,939,149,882**		**19,338,109,569**		**19,643,509,867**

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur keberhasilan tercapainya Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kota Yogyakarta** serta Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat, dengan indikator kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan, dengan indikator kinerja Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan (rupiah).
3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Pertanian dan Pangan									
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persentase	10,35	11.00-9.00	10.65-8.65	10.30-8.30	9.95-7.95	9.60-7.60	9.25-7.25	
3	Nilai PDRB sektor pertanian	Rp	71.700.000.000	74.200.000.000	76.600.000.000	79.000.000.000	81.400.000.000	83.900.000.000	86.300.000.000	
4	Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Predikat	AA (90,4-92,0)	AA (91,0-92,5)	AA (91,5-93,0)	AA (92,0-93,5)	AA (92,5-94,0)	AA (93,0-94,5)	AA (90,4-92,0)	
5	Pola Pangan Harapan	Nilai	91,61	92,11	92,61	93,11	93,61	94,11	94,61	
6	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan	Rupiah	10.028.604.900	10.070.000.000	10.100.000.000	10.200.000.000	10.230.000.000	10.280.000.000	10.300.000.000	
7	PAD Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp	593.172.000	656.875.000	681.925.000	704.015.000	725.909.000	752.378.000	774.947.000	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	komulatif	Persentase	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	
3.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ kota (sumber data: one data KKP)	positif	Persentase	113.09	99.62	99.69	99.77	99.85	99.92	100	
5.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
6.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota)	positif	Persentase	-100	100	100	100	100	100	100	
7.	Produktivitas per hektar per tahun	positif	Ton/Ha	5.8	5.9	6	6.15	6.3	6.5	6.7	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, pelaksanaan urusan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis bidang pangan, pertanian dan perikanan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Tahun 2025-2029 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan, yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran strategis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu 2025-2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta beserta stakeholders dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk tahun 2025-2029, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 15 September 2025

LAMPIRAN

POHON KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

TUJUAN

Tujuan OPD:

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Yogyakarta

1 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
2. Nilai PDRB sektor pertanian

SASARAN STRATEGIS

ULTIMATE OUTCOME / IKU 1

Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat

IK: Pola Pangan Harapan

ULTIMATE OUTCOME/IKU 2

Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan

IK: 1. Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan (Rupiah)
2. PAD Sektor Pertanian dan Perikanan (Rupiah)

ULTIMATE OUTCOME / IKU 3

Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif

IK: Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan

SASARAN PROGRAM

CSF 1

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

IK:
1. Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari
2. Angka Kecukupan Energi Ketersediaan

CSF 2

Meningkatnya Kemanfaatan Pangan

IK:
1. Angka Konsumsi Energi
2. Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)

CSF 3

Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan

IK:
1. Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman
2. Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman

CSF 1

Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian

IK:
Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan

CSF 2

Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian

IK:
Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani

CSF 3

Meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis

IK:
Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis

CSF 4

Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis

IK:
Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis

CSF 5

Meningkatnya pengawasan peredaran obat hewan

IK:
Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan

CSF 6

Terkendalinya wabah PHMS

IK:
Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS

CSF 7

Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis

IK:
Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas

CSF 8

Meningkatnya pendayagunaan aset pertanian

IK:
PAD pertanian

CSF 9

Meningkatnya pendayagunaan aset perikanan

IK:
PAD Perikanan

CSF 10

Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan

IK:
PAD Kesehatan Hewan

CSF 1

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

IK:
1. Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan
2. Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan

SASARAN KEGIATAN

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertahanan kemandirian pangan lainnya
IK: Cakupan penyediaan infrastruktur pertahanan kemandirian pangan

IMMEDIATE OUTCOME 2
Meningkatnya aksesibilitas pangan masyarakat terhadap ketersediaan pangan
IK : Persentase aksesibilitas pangan masyarakat

IMMEDIATE OUTCOME 3
Terfasilitasnya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mencegah terselimuti pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan
IK: Persentase cadangan pangan pemerintah daerah

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya fasilitasi pengembangan konsumsi pangan
IK : Persentase masyarakat yang memiliki akses pengembangan pangan

IMMEDIATE OUTCOME 2
Menurunnya wilayah rawan pangan prioritas 2
IK: Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 2

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan
IK: Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

IMMEDIATE OUTCOME 2
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan
IK: Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)

IMMEDIATE OUTCOME 3
Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan
IK: Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya penggunaan sarana pertanian
IK: Cakupan penggunaan penggunaan sarana pertanian

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian
IK: Persentase peningkatan kemakian kelas kelompok tani

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya capaian UBI yang terbina
IK: Persentase UBI yang terbina

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pembinaan UPI
IK: Persentase cakupan pembinaan UPI

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat hewan
IK: Cakupan pengawasan peredaran obat hewan

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan
IK: Cakupan penjaminan kesehatan hewan

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pengendalian kasus zoonosis
IK: Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan
IK: 1. Jumlah produksi benih padi Kelas Tegalsiyo
2. Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pasang dan Kebun Hortikultura

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya ikan
IK: Produksi Benih Ikan

IMMEDIATE OUTCOME 1
Terfasilitasinya Pemotongan Hewan di RPH yang memenuhi persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
IK : Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH

IMMEDIATE OUTCOME 2
Meningkatnya jumlah pelayanan jasa medik veteriner
IK : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan

IMMEDIATE OUTCOME 1
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan
IK:
1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan
2. Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas

IMMEDIATE OUTCOME 2
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan
IK : Nilai Pengisotan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan

IMMEDIATE OUTCOME 3
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Pangan
IK : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan

IMMEDIATE OUTCOME 4
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan
IK : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan

IMMEDIATE OUTCOME 5
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Pangan
IK : Persentase Rencana Pengadaan yg dikumonkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan

SASARAN SUB KEGIATAN

OUTPUT
Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Ketersediaan Pangan yang Tersedia

Jumlah Infrastruktur Pendukung Ketersediaan Pangan yang Tersedia

OUTPUT
Terfasilitasinya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

OUTPUT
Terfasilitasinya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal

Jumlah laporan dukungan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal

OUTPUT
Terwujudnya Informasi Stok Pangan

Informasi Stok Pangan

OUTPUT
Terwujudnya Neraca Bahan Makanan (NBM)

Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)

OUTPUT
Terfasilitasinya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara

OUTPUT
Terfasilitasinya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

OUTPUT
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

OUTPUT
Terwujudnya Penyediaan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disesuaikan

OUTPUT
Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi Pemasukan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

OUTPUT
Terwujudnya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

OUTPUT
Terwujudnya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

OUTPUT
Terfasilitasinya pelaksanaan pengawasan pangan segar asal tumbuhan

Jumlah laporan pengawasan pangan segar asal tumbuhan

OUTPUT
Terfasilitasinya pengawasan peredaran produk hewan

Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan

OUTPUT
Terfasilitasinya pengawasan pada tahi usaha produk hewan

Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap persyaratan cara yang baik

OUTPUT
Terfasilitasinya Penggilan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah Penggilan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

OUTPUT
Terlaksananya Pengawasan Sarana Produksi Pertanian Berupa dengan Kemudian, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Jumlah Pengawasan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian Berupa dengan Kemudian, Teknologi dan Spesifik Lokasi

OUTPUT
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

OUTPUT
Terlaksananya Penyelenggaraan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

OUTPUT
Terwujudnya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Budidi Daya Ikan Kecil

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

OUTPUT
Terfasilitasinya Pendampingan, Pemberdayaan Aktor Baru Pengolahan, Pemasaran, Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan

Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Pemberdayaan Aktor Baru Pengolahan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan

OUTPUT
Terfasilitasinya pembinaan terhadap Penerapan Pengawasan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang meliputipelaksanaan pembinaan terhadap Penerapan Pengawasan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan

OUTPUT
Terfasilitasinya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan

Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar

OUTPUT
Terfasilitasinya surveilans penyakit hewan dan asuransi pada Hewan

Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan asuransi pada Hewan

OUTPUT
Terlaksananya Penanggulangan Bencana Non Alam yang Beredar Zoonosis

Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Beredar Zoonosis

OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman

Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

OUTPUT
Terpeliharanya kemurnian dan ketersetaran SDG tanaman

Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian

OUTPUT
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Jumlah Pelabmasatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

OUTPUT
Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan

Jumlah Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan

OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan Benih dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pemanfaatan Pengelolaan Benih dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

OUTPUT
Terwujudnya Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH

Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan dan Produk Hewan

OUTPUT
Terwujudnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen

OUTPUT
Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

OUTPUT
Terfasilitasinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

OUTPUT
Terwujudnya Data Statistik Dinas

Jumlah Orang yang Melayani Data Gis dan Tanggapan ASN

OUTPUT
Terwujudnya Penyelenggaraan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen Bahan Tanggapan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

OUTPUT
Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

OUTPUT
Terwujudnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengawas Fungsional

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengawas Fungsional

OUTPUT
Terwujudnya Kebutuhan Perkantoran dan Rumah Tangga

Jumlah Kebutuhan Perkantoran dan Rumah Tangga yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Kebutuhan Rumah Tangga dan Penggandaan

Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga dan Penggandaan yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD

OUTPUT
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

OUTPUT
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Aset Tetap yang Dimiliki

Jumlah Aset Tetap yang Dimiliki

OUTPUT
Terwujudnya Pemeliharaan dan Aset Tetap yang Dimiliki

Jumlah Unit Peralatan yang Dimiliki

OUTPUT
Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan dan Asuransi Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

OUTPUT
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara

OUTPUT
Terlaksananya Pemeliharaan/ Perbaikan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

OUTPUT
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

OUTPUT
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saraana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Saraana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

OUTPUT
Terwujudnya Jasa Penelitian, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Asuransi Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

OUTPUT
Terwujudnya Penyediaan dan Pengelolaan Kantor

Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket/ Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

OUTPUT
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

OUTPUT
Terwujudnya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

OUTPUT
Terwujudnya Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan

Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

OUTPUT
Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai

OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan

Jumlah Paket/ Pengelolaan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan

OUTPUT
Terwujudnya Pengelolaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Paket/ Pengelolaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

CROSS CUTTING

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
Dinas Perdagangan	Pemantauan stok, distribusi, harga dan pasokan pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan,
Dinas Kesehatan	Data prevalensi stunting, pengawasan mutu dan keamanan pangan
Dinas PSA2KB	Data prevalensi stunting
Kemantren	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan
Satpol PP	Pengawasan mutu dan keamanan pangan

CROSS CUTTING

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
Kemantren	Pemberdayaan masyarakat, kelompok tani dan pelaku utama perikanan
Dinas PSA2KB	Data prevalensi stunting
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan dan Non Perizinan

CROSS CUTTING

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
Bappeda	Penyusunan dokumen perencanaan PD, review advis planning PD, RKPD, Renja PD, Analisis Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian
BPKAD	Penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan kebijakan, produk hukum, penataan kelembagaan, RB, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan pelayanan publik, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, pengadaan barang jasa
Inspektorat	Pengawasan dan konsulting
Dinas Kominfosan	Pengembangan e-government, penyelenggaraan data sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

Cascading Sasaran Strategis dan Program Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
	Dinas Pertanian dan Pangan	1.1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	Pola Pangan Harapan	Pola pangan Harapan = penjumlahan dari skor 9 kelompok pangan	**Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari = jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Bidang Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan = Hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Pangan
						Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Angka Konsumsi Energi	Angka Konsumsi Energi = Diperoleh dari angka SUSENAS yang diolah oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan rumus harmonisasi PPH	Bidang Pangan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) = Jumlah kelurahan dikurangi kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 dibagi dengan jumlah kelurahan x 100	Bidang Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman = 60 dikalikan persentase sampel pangan yang aman ditambah 40 dikalikan bobot sertifikasi dan registrasi PSAT dibagi dengan 90 (target RPJMN) dikali 100	Bidang Pangan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman = jumlah sampel yang aman dibagi jumlah total sampel x 100	Bidang Pangan
		1.2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan = Pendapatan petani +Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***	Meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase UBI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% A : UBI yang memenuhi persyaratan teknis Z : UBI yang terbina (target sampai dengan tahun 2030) A/Z x 100%	Bidang Perikanan dan Kehewanan

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% B : UPI yang memenuhi persyaratan teknis Y : UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 B/Y x 100%	Bidang Perikanan dan Kehewanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan	Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan = jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan dibagi total jumlah petani sawah dikali 100	Bidang Pertanian
						Meningkatnya pengawasan peredaran obat hewan	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan = Jumlah obat hewan yang sesuai peraturan (A) dibagi jumlah sampel obat hewan yang diawasi (B) di kali 100 Jumlah sampel yang diawasi setiap tahun 500 sampel Rumus = A/BX100	Bidang Perikanan dan Kehewanan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalinya wabah PHMS	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS = Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS (A) dibagi jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta (B) dikali 100	Bidang Perikanan dan Kehewanan
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas = Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas (A) dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta (B) dikali 100	Bidang Perikanan dan Kehewanan
					Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian	Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani= Jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani dibagi jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan dikali 100%	Bidang Pertanian

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
			PAD Sektor Pertanian dan Perikanan	PAD Sektor Pertanian dan Perikanan = PAD Pertanian + PAD Perikanan + PAD Kesehatan hewan	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***	Meningkatnya pendayagunaan aset perikanan	PAD perikanan	PAD Perikanan = PAD Ikan Hias + PAD Ikan Konsumsi	Bidang Perikanan dan Kehewanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya pendayagunaan aset pertanian	PAD pertanian	PAD pertanian = PAD KPNP+PAD Kebun bibit Tegalrejo+PAD Kebun Hortikultura	Bidang Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan	PAD kesehatan hewan	PAD kesehatan hewan = PAD Poliklinik Hewan + PAD RPH	Bidang Perikanan dan Kehewanan
		1.3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
							Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Sekretariat
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan = Jumlah Kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Tim kerja Ketahanan Pangan	Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat = Jumlah Penyedia pangan dibagi dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta	Tim kerja Ketahanan Pangan	Subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
						Subkegiatan Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
						Subkegiatan Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan
						Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Persentase cadangan pangan daerah yang dikelola= jumlah cadangan pangan yang dikelola dibagi total cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta dikali 100 %	Tim kerja Ketahanan Pangan	Subkegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Meningkatnya fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaraga	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan = Jumlah Masyarakat yang Memiliki Akses	Tim kerja Ketahanan Pangan	Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		man pangan	Penganekaragaman Pangan dibagi Jumlah Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan x 100 Keterangan : '- Sumber data Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan dari Dinkes		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Menurunnya wilayah rawan pangan prioritas 3	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 = Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 (hasil survei DPP)	Tim kerja Ketahanan Pangan	Subkegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) = pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di kota Yogyakarta dikali seratus persen	Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan	Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						Subkegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
						Subkegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
						Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan	Cakupan pengawasan PSAH dan PSHP = pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan di kota	Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan	Subkegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
			PSHP)	Yogyakarta dikali seratus persen				
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan = pengawasan pelaku usaha pangan asal hewan dan hasil perikanan yang memenuhi hygiene sanitasi	Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan	Subkegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
						Subkegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya capaian UBI yang terbina	Persentase UBI yang terbina	Persentase capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan dibagi UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 di kali 100% C : Capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Z : UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 C/Z x 100%	Tim Kerja Bimbingan Usaha Perikanan	*Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan*
						Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya pembinaan UPI	Persentase cakupan pembinaan UPI	Persentase capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan dibagi UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 di kali 100% D : Capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Y : UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 D/Y x 100%	Tim Kerja Bimbingan Usaha Perikanan	*Subkegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	*Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian = jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi dibagi total jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi x 100	Tim Kerja Sarana Prasarana Pertanian	*Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat hewan	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan = jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi (A) dibagi jumlah unit pengecer obat hewan (B) di kali 100 Jumlah unit pengecer obat hewan adalah 60 unit	Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	*Subkegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan*	*Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan*	*Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar*
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	Cakupan pengendalian kasus PHMS = Jumlah PHMS yang terkendali (A) dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian Keterangan : '- Mendasarkan Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 (B) di kali 100 - PHMS berjumlah 21 jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia 3 jenis belum ada di Indonesia)	Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	*Subkegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan*	*Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan*	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian bencana zoonosis	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas = Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali (A) dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Keterangan : '- Mendasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota (B) dikali 100 - Zoonosis prioritas tersebut : Rabies Anthrax AI Leptospirosis Brucellosis	Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	*Subkegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis*	*Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis*	*Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis*
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani = Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok dibagi jumlah kelompok tani pada tahun tersebut dikali 100	Tim Kerja Bimbingan Usaha Pertanian	*Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
						Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*
						Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Produksi Benih Ikan	Produksi Benih Ikan = Produksi benih ikan hias + produksi benih ikan konsumsi	Tim Kerja Bimbingan Usaha Perikanan	Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo = Jumlah produksi benih padi yang dihasilkan dari Kebun Tegalrejo	Tim Kerja Sarana Prasarana Pertanian	Subkegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
			Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura = Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang + Jumlah produksi benih tanaman Kebun Hortikultura		Subkegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlayaninya Pemotongan Hewan di RPH yang menerapkan persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH	Jenis Pelayanan Pemotongan di RPH = Pelayanan Pemotongan RPH Sapi + Pelayanan Pemotongan RPH Kambing	Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan		Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan = Jumlah dokumen	Subbagian KPEP			

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
	Perangkat Daerah	Pertanian dan Pangan	pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan	perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun dikali 100%				
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan = Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
							Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPP oleh BPKAD	Subbagian KPEP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai Penguatan Keuangan dan	Hasil penilaian pengelolaan	Subbagian Umum dan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
	Perangkat Daerah	keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Aset Dinas Pertanian dan Pangan	keuangan DPP oleh BPKAD	Kepegawaian	Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian IP ASN DPP oleh BKPSDM	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPP oleh BPKAD	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Pangan	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan dikali 100%	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Yogyakarta	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Proporsi populasi yang asupan energinya dibawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif, digunakan untuk memonitor kondisi kerawanan pangan dan gizi				(Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi / Jumlah penduduk total) * 100%	%	10.35	11,00 - 9,00	10,65 - 8,65	10,30 - 8,30	9,95 - 7,95	9,60 - 7,60	9,60 - 7,60	9,25 - 7,25
						Sumber data:									
						SUSENAS									
	Nilai PDRB sektor pertanian	Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di sektor pertanian dalam suatu wilayah selama periode tertentu				Nilai PDRB sektor pertanian (BPS)	Rupiah	71,700,000,000	74,200,000,000	76,600,000,000	79,000,000,000	81,400,000,000	83,900,000,000	83,900,000,000	86,300,000,000
						Sumber data:									
						BPS									
			1.1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	Pola pangan Harapan	Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika	Pola Pangan Harapan = penjumlahan dari skor 9 kelompok pangan		91.61	92.11	92.61	93.11	93.61	94.11	94.11	94.61
						Sumber data:									
						SUSENAS									
			1.2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan	Peningkatan Omset dari kelompok pertanian dan perikanan yang dibina	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan = Pendapatan petani +Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Rupiah	10,028,604,900	10,070,000,000	10,100,000,000	10,200,000,000	10,230,000,000	10,280,000,000	10,280,000,000	10,300,000,000
						Sumber data:									
						1 Pendapatan petani	Rupiah	2,206,601,000	2,200,000,000	2,220,000,000	2,230,000,000	2,250,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	2,270,000,000
						2 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Rupiah	7,822,003,900	7,870,000,000	7,880,000,000	7,970,000,000	7,980,000,000	8,020,000,000	8,020,000,000	8,030,000,000
				PAD Sektor Pertanian dan Perikanan	Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan, Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser, Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura.	PAD Sektor Pertanian dan Perikanan = PAD Pertanian + PAD Perikanan + PAD Kesehatan hewan	Rupiah	593,172,000	656,875,000	681,925,000	704,015,000	725,909,000	752,378,000	752,378,000	774,947,000
						Sumber data:									
						1 PAD Pertanian	Rupiah	128,326,000	152,250,000	154,250,000	155,250,000	156,250,000	160,250,000	160,250,000	161,250,000
						2 PAD Perikanan	Rupiah	58,159,000	90,200,000	100,000,000	105,000,000	110,000,000	115,000,000	115,000,000	120,000,000
						3 PAD Kesehatan hewan	Rupiah	406,687,000	414,425,000	427,675,000	443,765,000	459,659,000	477,128,000	477,128,000	493,697,000
			1.3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	AA (90,258)	AA (90,4-92,0)	AA (91,0-92,5)	AA (91,5-93,0)	AA (92.0-93,5)	AA (92.5-94,0)	AA (92.5-94,0)	AA (93,0-94,5)
						Sumber data:									
						Hasil penilaian RB DPP oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPP 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPP 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPP 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DPP 7. Penilaian Pengawasan arsip internal	Nilai	AA (90,258)	AA (90,4-92,0)	AA (91,0-92,5)	AA (91,5-93,0)	AA (92.0-93,5)	AA (92.5-94,0)	AA (92.5-94,0)	AA (93,0-94,5)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025-2029

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional *WAJIB DIISI	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	**1.1.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan dibawah pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan					Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari = jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Kelurahan	27	28	0	0	0	0	0	0
									Sumber data:										
									1 Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Kelurahan	27	28	0	0	0	0	0	0
					1.1.1.1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah berbagai komponen penting yang memastikan produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan berjalan lancar. Komponen pendukung kemandirian pangan meliputi pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan.	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan = Jumlah Kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung	Kelurahan	27	28	0	0	0	0	0	0
									Sumber data:										
									1 Jumlah Kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Kelurahan	27	28	0	0	0	0	0	0
	1.1.2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	Ukuran yang menunjukkan jumlah energi (dalam kilokalori) yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap orang dalam suatu populasi selama periode waktu					Angka Kecukupan Energi Ketersediaan = Hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kkal/kapita/hari	2773.73	2775.43	2777.13	2778.83	2780.53	2782.23	2782.23	2783.93
									Sumber data:										
									1 Hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kkal/kapita/hari	2773.73	2775.43	2777.13	2778.83	2780.53	2782.23	2782.23	2783.93
					1.1.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	Pengukuran dan perhitungan rasio aksesibilitas pangan masyarakat yang melibatkan pengumpulan data tentang akses penduduk terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat = Jumlah penyedia pangan dibagi dengan jumlah penduduk Kota	Persen	3.37	3.37	3.37	3.38	3.38	3.39	3.39	3.39
									Sumber data:										
									1 Jumlah penyedia pangan (BPS, Disdag, DPP)	Unit	12,664	12,669	12,674	12,679	12,684	12,689	12,689	12,694
									2 Jumlah penduduk Kota Yogyakarta	Jiwa	375,780	375,770	375,660	375,420	375,070	374,580	374,580	373,970

				1.1.2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola	Persentase cadangan pangan daerah yang dikelola= jumlah cadangan pangan yang dikelola dibagi total cadangan pangan pemerintah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
								Sumber data:									
								1 Jumlah cadangan pangan yang	ton	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05
								2 Jumlah total cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta	ton	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05
	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Angka Konsumsi Energi	Digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi dan jumlah energi yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode					Angka Konsumsi Energi = Diperoleh dari angka SUSENAS yang diolah oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan	kkal/kapita/hari	1863.47	1883.00	1913.00	1953.00	2003.00	2050.00	2050.00	2100.00
								Sumber data:									
								SUSENAS									
				1.1.2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan	Masyarakat yang memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolahnya	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan = Jumlah Masyarakat yang Memiliki Akses Penganekaragaman Pangan dibagi Jumlah Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan x 100 Keterangan : '- Sumber data Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan dari Dinkes	Persen	13.57	13.57	14.02	14.48	14.93	15.38	15.38	15.83
								Sumber data:									
								1 Jumlah masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman	Orang	600	600	620	640	660	680	680	700
								2 Jumlah Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman	Jiwa	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421
1.1.3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	Wilayah bebas kerawanan pangan didapatkan dari analisis *Food Security and Vulnerability Atlas (*FSVA) yang menunjukkan prioritas 1, 2, 3 adalah wilayah					Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) = Jumlah kelurahan dikurangi kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 dibagi dengan jumlah kelurahan x 100	Persen	95.56	95.56	95.56	95.56	97.78	97.78	97.78	97.78
								Sumber data:									
								1 Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan	45	45	45	45	45	45	45	45

			rentan rawan pangan dan prioritas 4, 5, 6 adalah wilayah					2 Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 (hasil survei DPP)	Kelurahan	2	2	2	2	1	1	1	1
				1.1.3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Menurunnya wilayah rawan pangan prioritas 3	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 = Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 hasil survei DPP	Kelurahan	2	2	2	2	1	1	1	1
								Sumber data:									
								1 Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3	Kelurahan	2	2	2	2	1	1	1	1
1.1.4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	Pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji.					Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman = 60 dikalikan persentase sampel pangan yang aman ditambah 40 dikalikan bobot sertifikasi dan registrasi PSAT dibagi dengan 90 (target RPJMN) dikali 100	Persen	69.78	70.04	70.31	70.58	70.84	71.11	71.11	71.38
								Sumber data:									
								1 Persentase sampel pangan yang aman	persen	88	88.4	88.8	89.2	89.6	90	90	90.4
								2 Jumlah sertifikasi dan registrasi PSAT	persen	25	25	25	25	25	25	25	25
				1.1.4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pengawasan pangan segar asal tumbuhan dilakukan di 29 Pasar Rakyat yang berada di Kota Yogyakarta, dilakukan di ritel dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal tumbuhan 500 sampel pertahun. Dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) = pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di kota Yogyakarta	Persen	35.40	37.17	38.94	40.71	42.48	44.25	44.25	46.02
								Sumber data:									
								1 Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang	unit	200	210	220	230	240	250	250	260
								2 Jumlah total pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	unit	565	565	565	565	565	565	565	565
1.1.5. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal hewan dan	Pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase					Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman = jumlah sampel yang aman dibagi jumlah total sampel x 100	Persen	84.17	84.58	85.00	85.42	85.83	86.25	86.25	86.67
								Sumber data:									

			perikanan yang bermutu dan aman	didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal hewan dan perikanan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang					1 Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan yang aman	sampel	1,010	1,015	1,020	1,025	1,030	1,035	1,035	1,040
									2 Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan total	sampel	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
					1.1.5.1. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)	Pengawasan pangan segar asal hewan dan perikanan dilakukan di 29 Pasar Rakyat, ritel, dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal hewan dan perikanan sebanyak 1200 sampel pertahun. Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan.	Cakupan pengawasan PSAH dan PSHP = pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan di kota Yogyakarta dikali	Persen	31.24	31.93	32.63	33.33	34.03	34.73	34.73	35.43
									Sumber data:									
									1 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang aman	unit	268	274	280	286	292	298	298	304
									2 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan total	unit	858	858	858	858	858	858	858	858
					1.1.5.2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan	Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan = pengawasan pelaku usaha pangan asal hewan dan hasil perikanan yang memenuhi hygiene sanitasi	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									1 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan hasil perikanan yang memenuhi hygiene	unit	6	6	6	6	6	6	6	6
1.2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan	**1.2.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis	Pembinaan pada UBI untuk memenuhi persyaratan teknis, persentase didapatkan dari jumlah UBI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100%					Persentase UBI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% A : UBI yang memenuhi persyaratan teknis Z : UBI yang terbina (target sampai dengan tahun 2030)	Persen	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	18.00	20.00
									Sumber data:									
									1 UBI yang memenuhi persyaratan teknis	Unit	8	10	12	14	16	18	18	20

								2 UBI yang terbina (target sampai dengan tahun 2030)	Unit	100	100	100	100	100	100	100	100
				1.2.1.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya capaian UBI yang terbina	Persentase UBI yang terbina	Pembinaan UBI dalam 1 tahun, meliputi Anjangsana Penyuluh/Aktivitas Lapangan/Monitoring/Bimtek/Demplot/Kaji Terap)	Persentase capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan dibagi UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 di kali 100% C : Capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Z : UBI yang terbina sampai dengan	Persen	53.00	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	90.00	100.00
								Sumber data:								
								1 Capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan	Unit	53	60	65	70	80	90	90	100
								2 UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030	Unit	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pendayagunaan aset perikanan	PAD perikanan	Pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan di BBI dan Sub Raiser					PAD Perikanan = PAD Ikan Hias + PAD Ikan Konsumsi	Rupiah	58,159,000	90,200,000	100,000,000	105,000,000	110,000,000	115,000,000	115,000,000	120,000,000
								Sumber data:									
								1 PAD Balai Benih Ikan Hias dan Sub	Rupiah	27,370,000	54,800,000	60,000,000	63,000,000	66,000,000	69,000,000	69,000,000	72,000,000
								2 PAD Balai Benih Ikan Konsumsi	Rupiah	30,789,000	35,400,000	40,000,000	42,000,000	44,000,000	46,000,000	46,000,000	48,000,000
				1.2.1.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Produksi Benih Ikan	Jumlah Produksi benih Ikan Hias ditambah Ikan Konsumsi	Produksi Benih Ikan = Produksi benih ikan hias + produksi benih ikan konsumsi	Ekor	128,480	257,200	281,240	288,700	299,650	311,300	311,300	324,180
								Sumber data:									
								1 Produksi benih ikan hias	Ekor	25,380	56,200	57,240	58,950	62,150	65,050	65,050	68,180
								2 Produksi benih ikan konsumsi	Ekor	103,100	201,000	224,000	229,750	237,500	246,250	246,250	256,000
1.2.2. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis	Pembinaan pada UPI untuk memenuhi persyaratan teknis. Persentase didapatkan dari jumlah UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100%					Persentase UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% B : UPI yang memenuhi persyaratan teknis Y : UPI yang terbina sampai dengan	Persen	19.05	28.57	38.10	47.62	57.14	66.67	66.67	76.19
								Sumber data:									
								1 UPI yang memenuhi persyaratan teknis	Unit	4	6	8	10	12	14	14	16
								2 UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030	Unit	21	21	21	21	21	21	21	21

				1.2.2.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya pembinaan UPI	Persentase cakupan pembinaan UPI	Pembinaan UPI dalam 1 tahun, meliputi Anjangsana Penyuluh/Aktivitas Lapangan/Monitoring/Bimtek/Demplot/Kaji Terap)	Persentase capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan dibagi UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 di kali 100% D : Capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Y : UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030	Persen	23.81	33.33	42.86	57.14	71.43	85.71	85.71	100.00
								Sumber data:									
								1 Capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan	Unit	5	7	9	12	15	18	18	21
								2 UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030	Unit	21	21	21	21	21	21	21	21
1.2.3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan	Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturannya					Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan = jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan dibagi total jumlah petani sawah dikali	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:									
								1 Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan	orang	99	99	99	99	99	99	99	99
								2 Jumlah total petani sawah	orang	99	99	99	99	99	99	99	99
				1.2.3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian = jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi dibagi total jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi x	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:									
								1 Jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi	orang	99	99	99	99	99	99	99	99
								2 Jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi	orang	99	99	99	99	99	99	99	99

Meningkatnya pendayagunaan aset pertanian	PAD pertanian	Pendapatan yang berasal dari hasil kebun Hortikultura, Kebun Plasma Nutfah Pisang, dan Kebun bibit Tegalrejo					PAD pertanian = PAD KPNP+PAD Kebun bibit Tegalrejo+PAD Kebun Hortikultura	Rupiah	128,326,000	152,250,000	154,250,000	155,250,000	156,250,000	160,250,000	160,250,000	161,250,000
							Sumber data:									
							1 PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang	Rupiah	46,350,000	47,000,000	48,000,000	49,000,000	49,000,000	51,000,000	51,000,000	52,000,000
							2 PAD Kebun Hortikultura	Rupiah	36,476,000	37,000,000	38,000,000	38,000,000	39,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000
							3 PAD Kebun Bibit Tegalrejo	Rupiah	45,500,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000
			1.2.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo	Produksi benih padi yang dihasil dari Kebun Tegalrejo	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo = Jumlah produksi benih padi yang dihasilkan dari Kebun Tegalrejo	Kilogram	13,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
							Sumber data:									
							Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo	Kilogram	13,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
					Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura = Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang + Jumlah produksi	Batang	6,340	6,438	6,456	6,654	6,738	6,814	6,814	7,121
							Sumber data:									
							1 Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang	Batang	4,369	4,464	4,477	4,673	4,735	4,779	4,779	4,881
							2 Produksi benih tanaman Kebun Hortikultura	Batang	1,971	1,974	1,979	1,981	2,003	2,035	2,035	2,240
Meningkatnya pengawasan peredaran obat hewan	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	Pengawasan peredaran obat hewan meliputi pemeriksaan fisik sesuai dengan peraturan, persentase didapatkan dari jumlah obat hewan yang sesuai peraturan dibagi dengan jumlah sampel obat hewan yang diawasi di kali 100.					Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan = Jumlah obat hewan yang sesuai peraturan (A) dibagi jumlah sampel obat hewan yang diawasi (B) di kali 100 Jumlah sampel yang diawasi setiap tahun 500 sampel Rumus = A/BX100	Persen	20	21	22	23	24	25	25	26
							Sumber data:									
							1 Jumlah obat hewan yang sesuai	sampel	100	105	110	115	120	125	125	130
							2 Jumlah sampel obat hewan yang	sampel	500	500	500	500	500	500	500	500

				1.2.3.3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat hewan	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	Pembinaan dan Pengawasan unit pengecer obat hewan untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan = jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi (A) dibagi jumlah unit pengecer obat hewan (B) di kali 100 Jumlah unit pengecer obat hewan	Persen	76.67	83.33	86.67	90.00	93.33	96.67	96.67	100.00
								Sumber data:									
								1 Jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi di tahun berjalan	unit	46	50	52	54	56	58	58	60
								2 Jumlah unit pengecer obat hewan	unit	60	60	60	60	60	60	60	60
1.2.4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya pendayagunaan aset pertanian	Persentase prasarana pertanian yang memadai	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik					Persentase prasarana pertanian yang memadai = Jumlah prasarana yang berfungsi baik (20 unit) dibagi jumlah prasarana yang dimilik (20	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:									
								1 Jumlah prasarana yang berfungsi baik	unit	20	20	20	20	20	20	20	20
								2 Jumlah prasarana yang dimiliki	unit	20	20	20	20	20	20	20	20
				1.2.4.1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana petanian sesuai yang dibutuhkan	Persentase prasarana pertanian yang telah tersedia	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	Persentase prasarana pertanian yang telah tersedia = Jumlah prasarana pertanian yang telah tersedia dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:									
								1 Jumlah prasarana pertanian yang telah tersedia	unit	20	20	20	20	20	20	20	20
								2 Jumlah prasarana yang dibutuhkan	unit	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2.5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya wabah PHMS	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK3 20/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali					Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS = Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS (A) dibagi jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta (B) dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:									
								1 Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS	Kemantren	14	14	14	14	14	14	14	14

			dari wabah PHMS dibagi julah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100.					2 Jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta	Kemantren	14	14	14	14	14	14	14	14
				1.2.5.1. Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah PHMS yang terkendali dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 di kali 100.	Cakupan pengendalian kasus PHMS = Jumlah PHMS yang terkendali (A) dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian Keterangan : '- Mendasarkan Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 (B) di kali 100 - PHMS berjumlah 21 jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia 3 jenis belum ada di Indonesia)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:								
								1 Jumlah PHMS yang terkendali	Jenis	21	21	21	21	21	21	21	21
								2 Jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian	Jenis	21	21	21	21	21	21	21	21
	Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan	PAD kesehatan hewan	Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik Hewan, jasa Pemotongan Hewan di RPH Giwangan dan					PAD kesehatan hewan =PAD Poliklinik Hewan +	Rupiah	406,687,000	414,425,000	427,675,000	443,765,000	459,659,000	477,128,000	477,128,000	493,697,000
								Sumber data:								
								1 PAD Poliklinik Hewan	Rupiah	331,642,000	336,000,000	346,000,000	359,840,000	374,234,000	389,203,000	389,203,000	404,772,000
								2 PAD Rumah Pemotongan Hewan	Rupiah	75,045,000	78,425,000	81,675,000	83,925,000	85,425,000	87,925,000	87,925,000	88,925,000
				1.2.5.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Meningkatnya jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	Pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	Tindakan	42,364	42,606	43,825	45,479	47,254	49,462	49,462	51,522
								Sumber data:								
								Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	Tindakan	42,364	42,606	43,825	45,479	47,254	49,462	49,462	51,522
				1.2.5.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Terlayaninya Pemotongan Hewan di RPH yang menerapkan persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH	Pelayanan pemotongan hewan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jenis Pelayanan Pemotongan di RPH = Pelayanan Pemotongan RPH Sapi + Pelayanan Pemotongan RPH Kambing	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2
								Sumber data:								
								Jenis Pelayanan Pemotongan di RPH (RPH Sapi dan RPH Kambing)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2

1.2.6. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas dibagi jumlah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100.					Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas = Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas (A) dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta (B) dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:								
								1 Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas	Kemantren	14	14	14	14	14	14	14	14
								2 Jumlah kemantren di Kota Yogyakarta	Kemantren	14	14	14	14	14	14	14	14
				1.2.6.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian bencana zoonosis	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah kasus zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota dikali 100.	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas = Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali (A) dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Keterangan : '- Mendasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota (B) dikali 100 - Zoonosis prioritas tersebut : Rabies Anthrax AI Leptospirosis Brucellosis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
								Sumber data:								
								1 Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5
								2 Jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5

	1.2.7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian	Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	kelompok tani yang menghasilkan omzet akan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing pertanian di kota Yogyakarta. sumber data : survey penyuluh pertanian.					Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani= Jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani dibagi jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan dikali 100%	Persen	20.27	21.28	22.30	23.31	24.32	25.34	25.34	26.35
									Sumber data:									
									1 Jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	Kelompok	60	63	66	69	72	75	75	78
									2 jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan	Kelompok	296	296	296	296	296	296	296	296
					1.2.7.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	proporsi kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (misalnya dari kelas pemula ke madya, madya ke utama, atau utama ke mandiri) dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani yang ada.	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani = Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok dibagi jumlah kelompok tani pada tahun tersebut dikali 100	Persen	6.60	6.76	7.09	7.43	7.77	8.11	8.11	8.45
									Sumber data:									
									1 Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok	Kelompok	19	20	21	22	23	24	24	25
									2 Jumlah kelompok tani pada tahun berjalan	Kelompok	288	296	296	296	296	296	296	296
1.3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif	**1.3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-					Hasil penilaian SAKIP oleh	Nilai	A (88,49)	A (88,5-89,5)	A (89,0-90,5)	A (89,5-91,0)	A (90,0-91,5)	AA (90,5-92,0)	AA (90,5-92,0)	AA (91,0-92,5)
									Sumber data:									
									Hasil penilaian SAKIP oleh	Nilai	A (88,49)	A (88,5-89,5)	A (89,0-90,5)	A (89,5-91,0)	A (90,0-91,5)	AA (90,5-92,0)	AA (90,5-92,0)	AA (91,0-92,5)
			Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan						Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	4.537	4.54	4.56	4.58	4.6	4.62	4.62	4.64
									Sumber data:									
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	4.537	4.54	4.56	4.58	4.6	4.62	4.62	4.64
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan						Nilai Survey Indeks Kepuasan	Nilai	82.1	82.6	83.1	83.6	84.1	84.6	84.6	85.1
									Sumber data:									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.1	82.6	83.1	83.6	84.1	84.6	84.6	85.1

						Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan = Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
						Sumber data:									
		1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan		Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu	Dokumen	16	15	15	15	15	15	15	15
						Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang	Dokumen	16	15	15	15	15	15	15	15
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan = Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
						Sumber data:									
						Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai		1	1	1	1	1	1	1	1
						Jumlah Data statistik sektoral		1	1	1	1	1	1	1	1
		1.3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
						Sumber data:									
						Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
		1.3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
						Sumber data:									
						Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
		1.3.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan		Hasil penilaian IP ASN DPP oleh BKPSDM	Nilai	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.8	85.9
						Sumber data:									
						Hasil penilaian IP ASN DPP oleh BKPSDM	Nilai	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.8	85.9

					1.3.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	85.7	86	86.3	86.6	86.9	87.2	87.2	87.5
									Sumber data:									
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	85.7	86	86.3	86.6	86.9	87.2	87.2	87.5
					1.3.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:									
									Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.3.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Pangan	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan		Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber Data :									
									Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	##########	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000
									Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan	Rupiah	##########	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000
					1.3.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:									
									Hasil penilaian pengelolaan aset DPP oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2025 - 2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No.1 Telp/Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221
E-mail: lingkunganhidup@jogjakota.go.id
Website : lingkunganhidup.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Renstra DLHK DIY Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kota Yogyakarta.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke depan, setidaknya untuk tahun 2025-2029, DLH bertekad untuk memastikan kondisi Kota Yogyakarta berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

NIP: 197303021992031004

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sisematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah 8

2.2 Permasalahan 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 23

3.1 Tujuan 23

3.2 Sasaran 23

3.3 Strategi dan Penahapan Renstra 25

3.4 Arah Kebijakan 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 33

4.1 Program 33

4.2 Kegiatan 35

4.3 Sub Kegiatan 56

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah 91

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 95

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 96

BAB V PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan..... 11
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional..... 12
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-202415
Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah 21

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 25
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030..... 26
Tabel 3. 3 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ... 29

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD..... 39-55
Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta 70
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta..... 91
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta 95
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 9
Gambar 2.1 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 9
Gambar 2.1 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan..... 10
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 38

Gambar 4. 2 Peta Zonasi Pemeliharaan Taman dan Perindang.....59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, serta keberlanjutan sumber daya alam. Dinamika pembangunan yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi sering kali menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun ke depan yang berisi visi yang akan dituju oleh Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu ketugasan Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Selain hal tersebut Rencana Strategis DLH ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program dan kegiatan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni *"Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan."*. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja), sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah akan selaras dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dilakukan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dokumen Renstra ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra juga dilatarbelakangi oleh adanya tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti meningkatnya volume timbunan sampah, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, terdapat peluang berupa perkembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan regulasi nasional, serta semakin tingginya partisipasi publik dalam isu lingkungan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang visioner,

terukur, dan adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) mengenai penyelenggaraan perekonomian yang berwawasan lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058)
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dasar utama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan lingkungan hidup dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Adapun penyusunan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DLH Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sisematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Struktur perangkat daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan

Pada bagian ini menjelaskan terkait tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran

Sasaran menjelaskan terkait hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.3 Penahapan Renstra

Pada bagian ini menjelaskan terkait Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini menjelaskan terkait Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang

4.1 Program

Pada bagian ini menjelaskan terkait program-program yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.2 Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.3 Sub Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan terkait subkegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Pada bagian ini menjelaskan terkait Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah beserta pemetaan program strategis Walikota yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan terkait Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini menjelaskan terkait Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Perangkat Daerah

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
d. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik;
e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Pengelolaan Persampahan;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

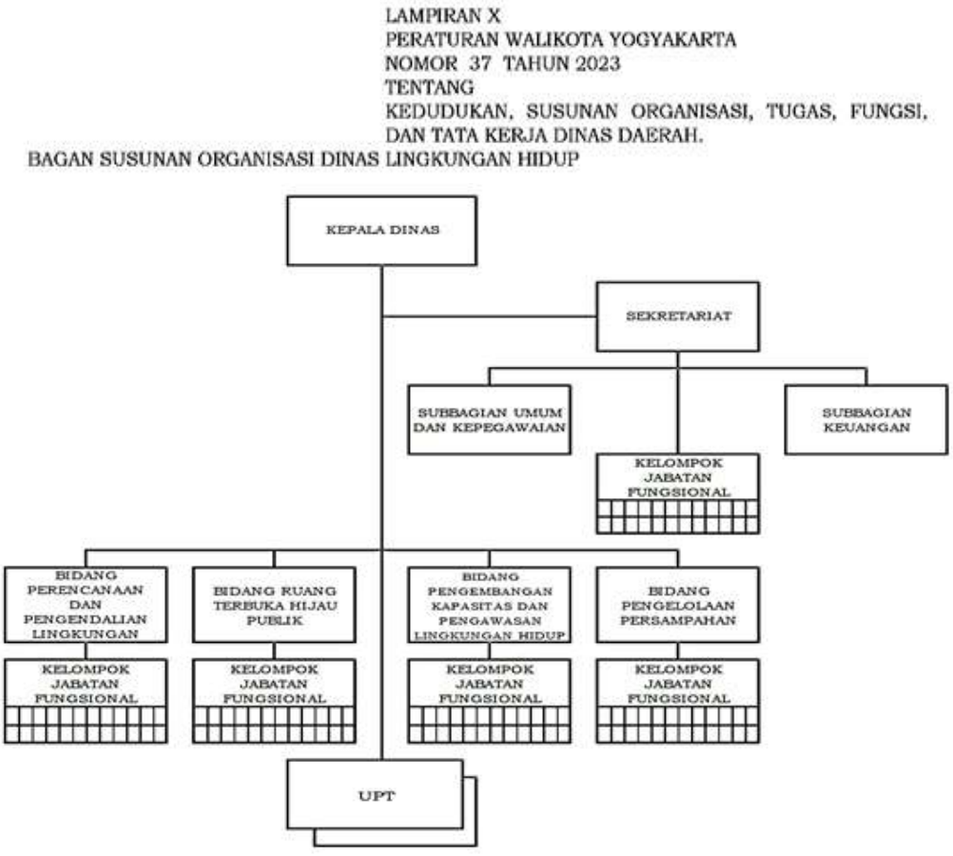

Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Gambar 2.1 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan

Gambar 2.1 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Juli 2025, jumlah pegawai DLH sebanyak 1.123 orang, terdiri dari 155 orang (13,81%) adalah PNS, 2 orang (0,18%) adalah PPPK, 48 orang (4,27%) adalah PJLOP, 917 orang (81,73%) adalah tenaga *outsourcing*.

Berdasar Kepangkatan/Golongan : Pegawai Golongan IV : 8 orang (4,09%); Pegawai Golongan III : 81 orang (51,59%); Pegawai Golongan II : 66 orang (42,03%), Pegawai PPPK Golongan IX : 1 orang (0,63%), dan Pegawai PPPK Golongan VII : 1 orang (0,63%).

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Doktor (S3)	0	0	0	0
2	Master (S2)	7	6	13	10
3	Sarjana (S1/D4)	8	22	30	48
4	Diploma (D3)	3	6	9	35
5	SLTA	75	1	76	159

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
6	SMP	22	0	22	0
7	SD	7	0	7	0
	Total	121	36	157	252

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 13 orang memiliki gelar S2, sebanyak 30 orang memiliki gelar S1/D4, sebanyak 9 orang memiliki gelar D3, sebanyak 76 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 22 orang berpendidikan SMP/Sederajat dan sebanyak 7 orang berpendidikan SD/Sederajat.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV C	0	0	0
2	IV B	0	1	1
3	IV A	4	3	7
4	III D	4	4	8
5	III C	1	0	1
6	III B	1	3	4
7	III A	52	17	69
8	II D	12	0	12
9	II C	32	6	38
10	II B	1	0	1
11	II A	14	0	14
12	I D	0	0	0
13	PPPK gol IX	0	1	1
14	PPPK gol VII	0	1	1
	Total	121	36	157

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 48 orang tenaga PJLOP dan 917 tenaga *outsourcing* baik untuk urusan administrasi maupun untuk tenaga teknis lapangan pada pekerjaan pembersihan sungai, penyapuan jalan, pengangkutan sampah, pemeliharaan taman, dan pemeliharaan pohon perindang

B. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan kantor dinas	1 unit
2	Bangunan kantor sektor kebersihan	7 unit
3	Bangunan laboratorium lingkungan	1 unit
4	Bangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)	6 unit
5	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	160 unit
6	Perlengkapan kantor dan mebelair	716 unit
7	Kalkulator	14 buah
8	Rak Besi Siku	22 unit
9	Lemari Kaca	34 unit
10	Monitor LED	6 unit
11	Dispenser	8 unit
12	Bracket Standing	2 unit
Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)		
1	Dump truck	5 unit
2	Sky truck / prunning	2 unit
3	Truk tangki penyiraman	9 unit
4	Motor roda tiga	13 unit
5	Gergaji mesin	14 unit
6	Mesin pemotong rumput	18 unit
7	Mesin pompa air	28 unit
8	Mobil / pick up	8 unit
9	Alat Pencacah Dahan	2 unit
10	Composter	48 unit
11	Wheel Bin / Tempat Sampah	3 unit
12	Gunting Dahan/ Tree Prunner	6 unit
13	Rambu Peringatan	8 unit
14	Traffic Cone	40 unit
15	Concrete Breaker/ Jack Hammer	2 unit
16	Tali Tambang	150 meter
17	Gerobak Dorong	1 unit
18	Steam Cleaner	1 unit
19	Tangga Teleskopik	1 unit
20	Air Compressor	1 unit
21	Kebun Bibit	1 unit
22	RTHP Lingkungan Permukiman	64 unit
Bidang Pengelolaan Persampahan (PP)		
1	Gerobak Sampah	54 unit
2	Kendaraan Roda 3 sampah	38 unit
3	Bin Compactor	68 unit
4	Dump Truck	25 unit
5	Arm Roll Truck	6 unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
6	Pick Up	5 unit
7	Container Sampah	18 unit
8	Transfer Depo	14 unit
9	TPS Permanen	2 unit
10	Compactor	20 unit
11	Road Sweeper	2 unit
12	Mesin Pencacah Organik	10 unit
13	Mesin Press Hidrolis	4 unit
14	Mesin Pencacah Kertas	1 unit
15	Wood Chipper	9 unit
16	Pick Up Pengurangan Sampah	2 unit
17	Kendaraan Roda 3 Pengurangan Sampah	1 unit
18	Fork Lift	2 unit
19	Wheel Loader	1 unit
20	Incenerator	7 unit
21	Modul RDF	3 unit
22	Belt Conveyor	16 unit
23	Bin Sampah	45 unit
24	Gerobak Dorong / Angkong	12 unit
25	Pengangkat Bak Sampah Hidrolis	3 unit
26	Timbangan Jembatan	1 unit
27	Alat Pencacah Plastik	2 unit
28	Rak Besi Magot	5 unit
29	Laci Box/ Biopon Magot	20 unit
30	Genset	4 unit
31	Crusher / Mixer Sampah	3 unit
32	Belt Conveyor	2 unit
33	Alat Ukur Kadar Air	3 unit
34	Biofil Lindi	17 unit
35	Mesin Cacah Pilah Otomatis / Gibrik	7 unit
36	Mesin Cacah Anorganik	3 unit
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)		
1	Kendaraan Roda 2	2 unit
2	Kendaraan Roda 3	5 unit
3	GPS	1 unit
4	Borehole Camera	1 unit
5	Trash Barier	58 meter
6	Mesin Potong Rumput	4 unit
7	Gergaji Mesin	2 unit
Bidang PKPLH		
1	Lemari Es	1 unit
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup		
1	Mikropipet	1 unit
2	Alat Uji Emisi Kendaraan Diesel	1 unit

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengelola 6 bangunan Unit Pengolah Sampah (UPS), yang terdiri dari UPS Nitikan, UPS Kranon, UPS Karangmiri, UPS Giwangan, UPS Sitimulyo (2 unit). Sektor kebersihan tersebar di 7 lokasi yaitu Sektor Malioboro dan Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Gunungketur, Sektor Krasak, Sektor Ngasem, Sektor Gading, Sektor Tungkak, dan Sektor Kotagede. DLH Kota Yogyakarta mempunyai 7 unit insinerator, yang terletak di Sitimulyo sebanyak 5 unit dan Giwangan

sebanyak 2 unit. DLH juga mengelola kebun bibit yang berlokasi di Gg. Empu Gandring VI Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Di tahun 2025 ini, DLH telah memasang alat perangkap sampah di sungai (*trash barrier*) terdapat pada sungai Code dan Sungai Winongo

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan : (1) Pencapaian sasaran strategis Renstra DLH 2023-2026; (2) Pencapaian SPM; dan (3) Pencapaian kinerja program dan kegiatan.

1. Analisis Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2017-2022 dan RPD Tahun 2023-2026
   Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target Renstra dan RPD Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 terdapat perubahan salah satu sasaran strategis OPD terkait persampahan. Setelah dilakukan pencermatan didapatkan hasil bahwa realisasi sasaran OPD tergolong baik dikarenakan banyak realisasi indikator sasaran yang mencapai target ataupun mendekati target.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Namun, pada tahun 2024 terdapat perubahan/ reviu salah satu sasaran strategis OPD yaitu di tahun 2023 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan indicator kinerja Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan pencermatan didapatkan hasil bahwa realisasi sasaran OPD tergolong baik dikarenakan banyak realisasi indikator sasaran yang mencapai target ataupun mendekati target.

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Indikator Kinerja Utama																
1.	Indeks Kulitas Air (IKA)	Persen	50,80%	39,79%	78,33%	51,00%	38,44%	75,38%	51,20%	38,54%	75,27%	-	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	86,40%	86,97%	100,66%	86,9%	90,70%	104,38%	87,40%	90,74%	103,83%	-	-	-	-	-	-
	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	Persen	29,85%	40,56%	135,88%	30,02%	40,60%	135,25%	40,60%	40,64%	100,10%	-	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,66%	52,05%	95,23%	-	-	-
	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,20%	62,60%	100,64%
2.	Persentase pengurangan sampah	Persen	18,43%	18,88%	102,43%	18,65%	23,50%	126,02%	26,00%	27,95%	107,50%	-	-	-	-	-	-
	Persentase pengangkutan sampah	Persen	99,32%	100,47%	101,16%	99,32%	101,20%	101,89%	99,47%	97,41%	97,93%	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Capaian Pengelolaan Persampahan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,60%	99,83%	100,23%	99,60%	82,83%	82,71%
3.	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B (70)	A (80,70)	115,29%	B (70)	A (87,28)	124,68%
	Indikator Kinerja Program																
4.	Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	12,03%	11,35%	94,36%	12,03%	12,63%	105,01%	15,28%	14,37%	94,06%	15,58%	15,54%	99,74%	-	-	-
5.	Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	Persen	67,73%	71,99%	106,29%	74,15%	75,64%	102,01%	80,61%	76,18%	94,50%	80,77%	76,84%	95,13%	-	-	-
6.	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	100%	50%	75%	150%

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
7.	Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%	100,00%	149,99%
8.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	Persen	92,24%	96,12%	104,20%	96,12%	98,06%	102,02%	100%	77,35%	77,35%	37,42%	35,48%	94,83%	-	-	-
	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,23%	69,35%	94,71%
9.	Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan	Persen	52,94%	53,25%	100,59%	52,94%	53,25%	100,59%	100%	56,21%	56,21%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Kampung ProKlim	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,17%	62,13%	105,00%	62,13%	65,09%	104,76%
10.	Persentase Bank sampah yang aktif	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,92%	72,67%	127,68%	60,00%	79,92%	123,20%

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11.	Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan	Persen	42,34%	47,75%	112,77%	45,97%	51,68%	112,42%	46,04%	56,19%	122,05%	-	-	-	-	-	-
	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00%	29,94%	372,93%	33,17%	32,71%	98,60%
12.	Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi	Persen	31,11%	31,11%	100,00%	31,11%	37,78%	121,43%	37,78%	53,33%	141,17%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,30%	73,74%	103,43%	-	-	-
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,63%	53,51%	101,67%
13.	Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,50%	75,50%	100,00%
14.	Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik	Persen	69,70%	69,70%	100,00%	72,31%	76,85%	106,28%	73,81%	78,28%	106,06%	-	-	-	-	-	-
	Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik	Persen	42,57%	30,31%	71,19%	42,9%	30,41%	70,87%	43,22%	30,40%	70,33%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,340%	23,341%	100%	23,3430%	23,351%	100,03%
15.	Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,6646%	61,8325%	100,2722%
16.	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	Persen	73,11%	72,26%	98,84%	74,61%	77,94%	104,46%	76,11%	78,33%	102,92%	-	-	-	-	-	-
	Persentase sampah yang tertangani	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,60%	80,54%	95,20%	83,40%	60,42%	72,45%
17.	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R	Persen	16,00%	24,79%	154,91%	16,00%	20,44%	127,74%	26,00%	21,65%	83,27%	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase sampah yang terkurangi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	19,29%	128,61%	16,20%	21,96%	135,55%
18.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	100%	A	A	100%

2.1.4 Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

   Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada Dinas/Instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta seperti pelayanan dokumen lingkungan, pelayanan persetujuan teknis dan SLO, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Pengelolaan sampah dll. Selain itu DLH Kota Yogyakarta menjalin Kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait pelayanan satu pintu yang ada di DPMPTSP meliputi:

   a. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
   b. Keputusan kelayakan lingkungan hidup
   c. Persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
   d. Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
   e. Izin penebangan pohon dan pemindahan taman
   f. Persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik
   g. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

h. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Pembuangan Emisi
i. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
j. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
k. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan Emisi
l. Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3
m. Perubahan Persetujuan Lingkungan

Selain itu DLH Kota Yogyakarta melakukan Kerjasama juga terkait Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan lokal dan kolaborasi dalam program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi.

2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.

Sebagai instansi pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga melayani masyarakat berupa layanan sebagai berikut :

a. Pelayanan Pengelolaan Sampah
b. Retribusi
c. Ruang Terbuka Hijau
d. Pertamanan dan Perindang
e. Program Kampung Iklim
f. Pembinaan Bank Sampah
g. Pengujian kualitas lingkungan yang meliputi sampel air dan udara

Selain itu DLH Kota Yogyakarta juga melibatkan dalam program pemberdayaan, pelestarian, kolaborasi dalam kegiatan penanaman pohon, bersih-bersih, dan kampanye lingkungan.

3. Masyarakat di lingkungan sekolah.

Masyarakat di lingkungan sekolah juga merupakan kelompok sasaran pelayanan DLH Kota Yogyakarta. Adapun pelayanan tersebut meliputi pendampingan:

a. Sekolah berwawasan lingkungan
b. Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)
c. Edukasi lingkungan hidup untuk siswa dan guru.
d. Workshop dan pelatihan lingkungan bagi pelajar.

4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Layanan DLH Kota Yogyakarta terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sumber pencemar meliputi :

a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mematuhi regulasi di bidang lingkungan hidup.

b. Penerapan sistem pengelolaan lingkungan melalui dokumen lingkungan yaitu AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan teknis dan SLO.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sering bekerja sama dengan berbagai mitra dalam menyelenggarakan pelayanannya, termasuk dalam inovasi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Mitra DLH dapat meliputi :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

DPMPTSP menjadi mitra DLH dalam hal pelayanan satu pintu kepada pelaku usaha/ kegiatan, meliputi :

a. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
b. Keputusan kelayakan lingkungan hidup
c. Persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
d. Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
e. Izin penebangan pohon dan pemindahan taman
f. Persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestic
g. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
h. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Pembuangan Emisi
i. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
j. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
k. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan Emisi
l. Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3
m. Perubahan Persetujuan Lingkungan

2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta

Dindikpora menjadi mitra DLH dalam melakukan Pembinaan Sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata di Kota Yogyakarta. Dindikpora memiliki peran penting dalam mendukung dan mengimplementasikan program Adiwiyata di sekolah, beriringan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi koordinator utama dalam pemberian penghargaan dan fasilitasi program Sekolah berwawasan lingkungan dan Adiwiyata. Peran Dindikpora yaitu melakukan pembinaan terhadap sekolah untuk menjadi Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata di Kota Yogyakarta.

3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta

Diskominfosan menjadi mitra DLH dalam hal digitalisasi pelayanan dengan aplikasi terpadu Jogja Smart Service (JSS). Didalam JSS pelayanan DLH meliputi :

a. Silaling
b. Perizinan Sektor Lingkungan (terintegrasi dari DPMPTSP)
c. Uji Kualitas Air (e-Labling)
d. Bank Sampah
e. Informasi Kualitas Lingkungan Hidup

Selain itu, terdapat layanan aduan pada JSS yang terintegrasi jika terdapat aduan lingkungan hidup akan terlapor pada admin aduan JSS DLH Kota Yogyakarta.

4. Forum Bank Sampah (FBS) Kota Yogyakarta

FBS Kota Yogyakarta menjadi mitra DLH dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan komunikasi kepada Masyarakat terkait peduli lingkungan. Dengan adanya forum bank sampah kota Yogyakarta ini diharapkan bank sampah di kota Yogyakarta ini dapat terbina dan aktif sehingga sampah di kota Yogyakarta ini dapat berkurang dan diolah dengan baik. Sehingga Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dan ekosistem persampahan secara berkelanjutan.

5. Tim Pendataan Wilayah

Tim Pendataan Wilayah merupakan mitra DLH dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan data sampah yang terkelola pada bank sampah yang ada di wilayah. Setiap bulan Tim Pendata melaporkan hasil binaan bank sampah pada aplikasi Bank Sampah yang ada di JSS yang selanjutnya DLH akan merekapitulasi dan melaporkan pada aplikasi SIPSN KLH. Adapun tugas – tugas tersebut meliputi :

a. Menyusun laporan kegiatan dan laporan pengelolaan sampah di bank sampah sesuai dengan bank sampah yang menjadi dampingannya setiap bulan serta tergabung dalam kegiatan forum bank sampah kemantren/kelurahan
b. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah kepada DLH
c. Memberikan rekomendasi kepada DLH berdasarkan hasil pendataan untuk pengembangan bank sampah

6. Bank Sampah Induk (BSI) Kota Yogyakarta

Bank Sampah Induk (BSI) menjadi mitra DLH dalam penyaluran sampah dari bank sampah unit ke offtaker. Keberadaan Bank Sampah Induk Jogja itu untuk mengatasi permasalahan BSU yang kesulitan menemukan mitra/pelapak untuk menyalurkan sampah yang telah terkumpul di BSU.

7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi mitra DLH dalam hal pengadaan tanah untuk RTHP, Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota dan koordinasi sinkronisasi terkait perencanaan tata ruang Kota.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD seperti Bank BPD DIY, Bank Jogja dan PDAM dalam kegiatan-kegiatan terkait lingkungan hidup di Kota Yogyakarta meliputi partisipasi pada kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Hari Lingkungan Hidup, Anugerah Lingkungan, dll

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adapun kerja sama daerah yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu meliputi :

1. Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati terkait Penerimaan Pembayaran Retribusi Persampahan Kebersihan Secara Non Tunai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kenyamanan dalam pemungutan dan penerimaan retribusi oleh DLH Kota Yogyakarta serta menyukseskan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).
2. Kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia terkait Kerja Sama Pemanfaatan Sampah Kota Yogyakarta Sebagai Refuse-Derived Fuel (RDF). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan sampah dan menciptakan nilai ekonomi dari RDF yang dihasilkan oleh unit pengolahan sampah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda DIY tentang Sinergi Pengoperasian Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA).
4. Kerjasama dengan PT Brahma Putera tentang pemanfaatan RTHP Gajahwong Edupark.
5. Kerjasama dengan Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM tentang pengolahan sampah daun dan ranting hasil pemangkasan pohon

2.2 Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

1.2.1 Permasalahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam upaya mewujudkan lingkungan di Kota Yogyakarta yang berkualitas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang banyak berdampak

pada lingkungan. Dengan demikian perlu didentifikasi permasalahan lingkungan sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah Kota Yogyakarta untuk pengembangan lokasi pengolahan sampah serta belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga dari sumbernya.

   Luas Kota Yogyakarta hanya 32,8 hektar dengan penduduk yang cukup padat menjadi kendala dalam pengembangan pengolahan persampahan. Penolakan warga atas keberadaan UPS (Unit Pengelolaan Sampah) yang berada di dekat dengan lingkungan permukiman menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan lokasi pengolahan sampah. Di sisi lain, pengurangan sampah di Kota Yogyakarta belum dapat berjalan maksimal, karena belum semua masyarakat menerapkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*) meskipun telah dilakukan edukasi yang menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan dan RT di setiap wilayah.

2. Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta.

   Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta disebabkan oleh pembuangan air limbah domestik, buangan sampah liar, dan limbah peternakan. Permasalahan ini tidak terlepas dari kondisi tata ruang dimana kepadatan masyarakat yang cukup tinggi terkonsentrasi di kawasan bantaran sungai dan menjadi tantangan dalam penanganan sanitasi. Penurunan kualitas air ditandai dengan tingginya parameter Nitrat dan *total coliform* di air tanah dan parameter *fecal coli, total coliform dan fosfat* yang melebihi baku mutu.

3. Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.

   Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) adalah fenomena di mana jumlah gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan gas fluorokarbon (F-gas) yang dilepaskan ke atmosfer mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas sehari-hari seperti pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, dan gas alam), deforestasi, pertanian intensif, serta kegiatan industri dan transportasi berkontribusi pada perubahan cuaca ekstrem dan peningkatan suhu.

4. Belum semua usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) melakukan pelaporan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

   Permasalahan yang cukup berdampak pada lingkungan yaitu masih adanya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Di sisi lain, perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan masih kurang tertib dan memahami fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan,

termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan. Beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan belum melaksanakan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup karena masih terkendala dalam penyediaan data dukung berupa hasil uji laboratorium maupun petugas khusus untuk menangani pengelolaan dan pelaporan lingkungan hidup.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta.

   Kota Yogyakarta dengan karakteristiknya yang padat penduduk menyebabkan sebagian besar penggunaan lahannya untuk permukiman dan perdagangan/jasa sehingga perluasan RTH yang merupakan unsur penting dari terciptanya ekologi kota yang nyaman dan sehat cukup terkendala.

   Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta yang terdiri dari jumlah % RTHP Publik dan RTH Privat baru mencapai 23% dari target nasional setiap regional dari target yang harus dipenuhi adalah 30%. Dalam data yang sudah disajikan, RTH Publik (RTHP) yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta baru mencapai 8% dari luas wilayah, padahal target minimalnya harus mencapai 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Dengan segala tantangan yang harus dihadapi dan kepentingan masyarakat yang sering bertolak belakang dengan upaya Pemerintah dalam penyediaan RTHP ini, maka perlu disusun strategi agar RTHP dapat ditingkatkan baik secara kualitas maupun kapasitasnya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, telaah RTRW Kota Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, dan regional di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimaksimalkan sebagai sarana prasarana pengelolaan sampah, serta pengadaan teknologi dalam pengolahan sampah.	Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta untuk pengembangan pembangunan lokasi pengolahan sampah dan belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga dari sumbernya.	Pengelolaan Persampahan yang belum optimal	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan.	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Tantangan penyediaan lahan dan penyusunan strategi pengelolaan sampah serta edukasi yang sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta.
Sungai di Kota Yogyakarta dapat menjadi lokasi yang indah dan sehat bahkan dikembangkan menjadi objek wisata meskipun dekat dengan permukiman warga.	Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta.	1. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah 2. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY	1. Tantangan dalam optimalisasi kegiatan pembersihan sampah di sungai. 2. Peningkatan pengendalian sumber pencemar pada air sungai yang disebabkan oleh air limbah.
Kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit karena udaranya masih cukup bersih.	Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Belum optimalnya transportasi public 3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik 4. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan 2. Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional	1. Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY 2. Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya	Tantangan peningkatan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca lingkup Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.
Berkembang pesatnya usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang	Belum semua usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota 2. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global	Tantangan transisi ke kota rendah emisi dan berketahanan lingkungan	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan. - Menerapkan mekanisme teguran dan sanksi bagi usaha

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
berada di wilayah Kota Yogyakarta dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah						dan/atau kegiatan yang melanggar dan menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup. - perlunya sistem database dan monitoring pelaporan lingkungan yang komprehensif
Lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang perlu dimaksimalkan untuk peningkatan luasan RTH Publik	Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY	Tantangan dalam penambahanh luasan RTH dan meningkatkan tutupan vegetasi dengan adanya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Perindang Jalan yang terkelola dengan baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD 2025-2029

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendasarkan pada visi dan misi RPJMD 2025-2029 yaitu "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".** Visi tersebut diwujudkan dengan misi:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah bidang Lingkungan mendukung misi ke-2 (dua), yaitu **"Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari."**

3.2 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan misi dalam RPJMD tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Daerah. Adapun Tujuan Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian
2. Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung tujuan ke-2 (dua), yaitu "**Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana".**

Tujuan Daerah Kota Yogyakarta di atas kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
5. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat
7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendukung Sasaran ke-3 (tiga) yaitu **"Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana".**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 didasarkan pada:

- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan
- Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan lima tahun ke depan. Tujuan merupakan dampak (*impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan demikian dapat dirumuskan tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 yaitu **"Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari"** dengan indikator "Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang diformulasikan dengan komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan.

Penetapan sasaran dirumuskan sesuai dengan urusan yang diampu perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup mengampu urusan lingkungan hidup, dan dengan acuan tujuan yang telah ditetapkan sehingga sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Berikut adalah matriks teknik perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya dalam Renstra 2025-2029:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari		Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	73.33	76.67	77.32	77.97	77.62	79.27	80.09	
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup (Persentase)	62.60	67.71	68.31	68.91	69.52	70.12	71.06	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capain Pengelolaan Persampahan (Persentase)	84.06	85.62	86.32	87.02	87.72	88.42	89.12	
		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3 Strategi dan Penahapan Renstra

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan dituangkan sebagai berikut:

1. Perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD.
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

5. Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).
6. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
7. Pengelolaan persampahan.

Penyusunan penahapan Renstra dilakukan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis yang mengacu pula pada target indikator yang ingin dicapai. Strategi penahapan Renstra DLH tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
1	2	3	4	5
Penguatan dasar dan kapasitas pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan dasar dan kapasitas pembangunan
   Tahap pertama dalam Renstra DLH Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Pada tahapan ini juga akan dilakukan evaluasi pengendalian pencemaran air dan udara sejalan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2025-2055. Dalam hal pengelolaan sampah, pada tahapan ini akan dilakukan peningkatkan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dimulai dari perhotelan. Selain itu juga dilakukan pemantapan infrastruktur melalui transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan di 2 Depo dan Unit Pengelola Sampah (UPS), serta penguatan pemasangan *trash barrier* di sungai sebagai upaya pengendalian pencemaran air. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terkait titik lokasi pemantauan air dan udara.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik
   Pada tahap kedua ini, merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pertama, dengan dasar-dasar pembangunan yang sudah kuat, kemudian akan dilakukan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat terkait kemudahan dalam mengakses layanan di bidang

lingkungan, seperti Uji Laboratorium, SILALING, perizinan, pembuatan dokumen UKL-UPL dan SPPL, serta pengembangan digitalisasi RTHP dengan pembuatan aplikasi basic dan penyajian data existing RTHP dan taman. Selain itu juga akan dilakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

   Pada tahap ini, dilakukan percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun perencanaan. Dalam rangka meningkatkan luasan % Ruang Terbuka Hijau Publik akan dilakukan penanaman pohon perindang pada jalur hijau dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk pengembangan RTHP baik secara kapasitas maupun kualitasnya. Dalam pengelolaan persampahan akan dilakukan penguatan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen rumah makan, restaurant, cafe, dan jasa boga. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah yang terolah sebesar 66,31%. Dilakukan pula peningkatan layanan pengumpulan sampah dengan cakupan rumah tangga terlayani sebesar 86.47% dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

   Tahap keempat fokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, merupakan hasil yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini dilakukan evaluasi data inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi, proses produksi, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan) dan pengelolaan limbah secara berkala setiap tahun. Dilakukan pula update tutupan vegetasi Kota Yogyakarta dan peningkatan luas RTH dengan deliniasi melalui citra satelit secara berkelanjutan setiap tahunnya dan refocusing fungsi RTHP dan taman terkait rencana penambahan dan pengembangannya. Pada pengelolaan persampahan dilakukan monitoring dan evaluasi sistem retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan secara digital, meningkatkan layanan pengumpulan sampah dengan cakupan rumah tangga terlayani sebesar 87.98% dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah, Meningkatkan dan transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan di 2 Depo, dan Peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah

yang terolah sebesar 72,92%. Pada tahap keempat ini juga dilakukan peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan
   Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya tujuan DLH yaitu "Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari". Pada tahap ini dilakukan penyelesaian pengurangan sampah sesuai target oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Bidang Manufaktur dan dilakukan pula peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah yang terolah dengan target akhir tahun sebesar 74,34%.

Lokus Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta untuk mendorong tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

3.4 Arah Kebijakan

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas; Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dan meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dalam mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Tujuan			
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas			
	Sasaran			
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan	1) Melaksanakan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 3) Melaksanakan Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota 4) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi KLHS 5) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	1) Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota 2) Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			4) Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 5) Melaksanakan penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut 6) Melaksanakan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7) Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 8) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Proklim 9) Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi RW/kampung Proklim 10) Memfasilitasi pembentukan RW/kampung Proklim di wilayah 11) Memfasilitasi pengusulan RW/kampung Proklim ke tingkat Provinsi dan Nasional 12) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 13) Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 14) Memfasilitasi pembentukan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 15) Memfasilitasi pengusulan Sekolah Adiwiyata ke tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau	1) Inventarisasi RTH di Kota Yogyakarta secara berkala, khususnya RTH Publik dan tutupan vegetasi. 2) Melaksanakan pembangunan RTHP dan penanaman pohon perindang pada jalur hijau untuk meningkatkan persentase RTHP. 3) Melaksanakan penyempurnaan atau penambahan fasilitas RTHP dan renovasi taman jalur hijau untuk meningkatkan kualitas RTHP. 4) Melaksanakan kolaborasi yang baik dengan OPD terkait dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong milik Pemerintah untuk pengembangan RTHP. 5) Sosialisasi pengelolaan RTH baik publik maupun privat kepada warga dan pemangku wilayah setempat. 6) Penyusunan peraturan/regulasi terkait tatacara pemberian izin penebangan pohon dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai upaya untuk mempertahankan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			luasan tutupan vegetasi. 7) Kerjasama dalam pengolahan sampah daun dan ranting hasil pemangkasan pohon. 8) Kerjasama dalam pemanfaatan RTHP 9) Menerapkan sistem asuransi untuk penjaminan korban terdampak kejadian pohon tumbang. 10) Menerapkan sistem informasi di RTHP yang terintegrasi JSS sebagai aplikasi penunjang pelaporan dan informasi kondisi RTHP. 11) Himbauan kepada akomodasi pariwisata seperti hotel, restauran, dsb untuk menambah dan mempertahankan RTH Privat.	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah	1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah 2) Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, optimalisasi kelembagaan dan pendanaan.	
		Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle)*	1) Melakukan Upaya Transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber 2) Meningkatkan dan optimalisasi fasilitas (untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular. 3) Penguatan operasional bank sampah unit di setiap kelurahan. 4) Penguatan dan mengoptimalkan bank sampah induk.	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1) Meningkatkan dan transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan. 2) Penguatan operasional TPS/Depo sebagai tempat pengumpulan dan pemilahan lanjutan. 3) Peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah.	
		Meningkatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah (*extended producer*	1) Melaksanakan kajian peta jalan pengurangan sampah oleh produsen 2) Meningkatkan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dimulai dari sektor hotel, restoran, kafe, dan produsen manufaktur.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
		responsibility)		
		Kerja sama pengelolaan sampah dengan pembiayaan kreatif (*creative financing)*	1) Pembaharuan data wajib retribusi, dan penataan/perbaikan SOP tata cara pemungutan retribusi kebersihan/per-sampahan. 2) Penguatan kapasitas dan keahlian petugas pemungut retribusi. 3) Peningkatan dan peralihan pembayaran retribusi secara non tunai. 4) Peningkatan sistem retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan secara digital.	
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah	1) Penguatan proses perencanaan dengan meningkatkan kolaborasi dengan Bidang satu Dinas untuk mencermati bersama indikator dan target kinerja. 2) Meningkatkan evaluasi terkait Pengukuran Kinerja berjenjang setiap level Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan tiap Triwulan. 3) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam verifikasi penyusunan Pelaporan Kinerja.	
		Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah	1) Memetakan risiko dari level Program hingga ke level Subkegiatan dengan kolaborasi antar bidang dan penanganannya dengan rapat, *brainstorming*, dan diskusi kecil. 2) Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat/Bimtek MR dan *sharing knowledge* ataupun Bimtek internal dari pegawai yang telah mengikuti bimtek. 3) Arahan dari pembina apel di setiap apel hari Senin supaya meningkatkan integritas dan kinerja. 4) Melaksanakan pengajian rutin dalam rangka pembekalan spiritual bagi pegawai beragama Islam supaya terhindar dari perilaku korupsi, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain.	
		Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah	1) Melaksanakan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terkait SPIP 2) Penerapan manajemen risiko dan mengintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan 3) Mengintegrasikan implementasi SPIP dengan program Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 4) Penyusunan Proses bisnis DLH 5) Melaksanakaan koordinasi dengan bidang terkait seluruh bukti dukung SPIP 6) Melaksanakan sosialisasi antikorupsi di internal DLH 7) Melaksakan evaluasi dan pembaharuan dokumen pendukung SPIP 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat atau auditor eksternal	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2025-2029, yang nantinya akan terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 7 (tujuh) program teknis.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program rutin administrasi perkantoran terdiri dari Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program kesekretariatan yang ada pada DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, serta memiliki Indikator Kinerja meliputi Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup, Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup, dan Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu untuk Program teknis di DLH Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program Perencanaan Lingkungan Hidup merupakan program yang mengampu terkait perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPLH dan KLHS. Program ini memiliki Sasaran Program yaitu Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup dan Indikator kinerjanya adalah Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan program yang mengampu terkait pengendalian lingkungan hidup di DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kinerja yaitu Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara. Sedangkan, untuk Indikator kinerjanya meliputi Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

   Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) merupakan program yang mengampu terkait pengendalian B3 dan LB3 di DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan indikator kinerjanya adalah Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan program yang mengampu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH terhadap pelaku usaha/ kegiatan. Program ini memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi. Sedangkan untuk indikator kinerjanya meliputi Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan.

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

   Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) merupakan program yang mengampu Pengelolaan RTHP dan taman perindang di Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu meningkatnya pengelolaan RTH dan indikator kinerjanya adalah Persentase Ruang Terbuka Hijau.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat merupakan program yang mengampu terkait pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, sekolah, dan wilayah. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki 3 indikator kinerja meliputi Persentase Kampung Proklim, Persentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata serta Persentase bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)

7. Program Pengelolaan Persampahan

   Program Pengelolaan Persampahan merupakan program yang mengampu pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Program ini

memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kinerja yaitu Meningkatnya pengurangan sampah dan Meningkatnya penanganan sampah. Sedangkan indikator kinerjanya yaitu Persentase sampah yang terkurangi dan Persentase sampah yang tertangani

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup ada 2 cakupan kegiatan yaitu :
    1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang mempunyai sasaran kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, kemudian sasaran kegiatan yang kedua adalah Penilaian dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.
    2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota memiliki mempunyai sasaran kegiatan Meningkatnya pemantauan KLHS dengan indikator kinerja Rerata penilaian pemantauan KLHS
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ada 2 kegiatan :
    1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mempunyai 2 sasaran kegiatan Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup dengan indikator kinerja Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup dan Terpeliharanya kebersihan Sungai dengan indikator kinerja Persentase kebersihan sungai yang terpelihara.
    3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan 2 sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca dengan indikator kinerja Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca, dan Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

c. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai 1 kegiatan yaitu:
    1. Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 dengan indikator kinerjanya Jumlah dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai 1 kegiatan yaitu :
    1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 2 sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sasaran kegiatan berikutnya adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan.

e. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai 1 kegiatan:
    1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan mempunyai 2 sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya luas tutupan vegetasi dengan indikator kinerja Luasan tutupan vegetasi dan sasaran kegiatan Optimalisasi pengelolaan RTH dengan indikator kinerja Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mempunyai kegiatan yaitu :
    1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota dan indikator kinerja Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH.

g. Program Pengelolaan Persampahan memiliki kegiatan
    1. Pengelolaan Sampah dengan sasaran kegiatan Meningkatnya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dengan indikator kinerja Tonase pengurangan sampah dan sasaran kegiatan Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan indikator kinerja Tonase penanganan sampah

h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kegiatan :
    1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset dengan indikator kinerja Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup
    3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset dengan indikator kegiatan Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup
    4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dengan indikator kinerja Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup
    5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dengan indikator kinerja Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dijelaskan pada gambar dibawah ini:

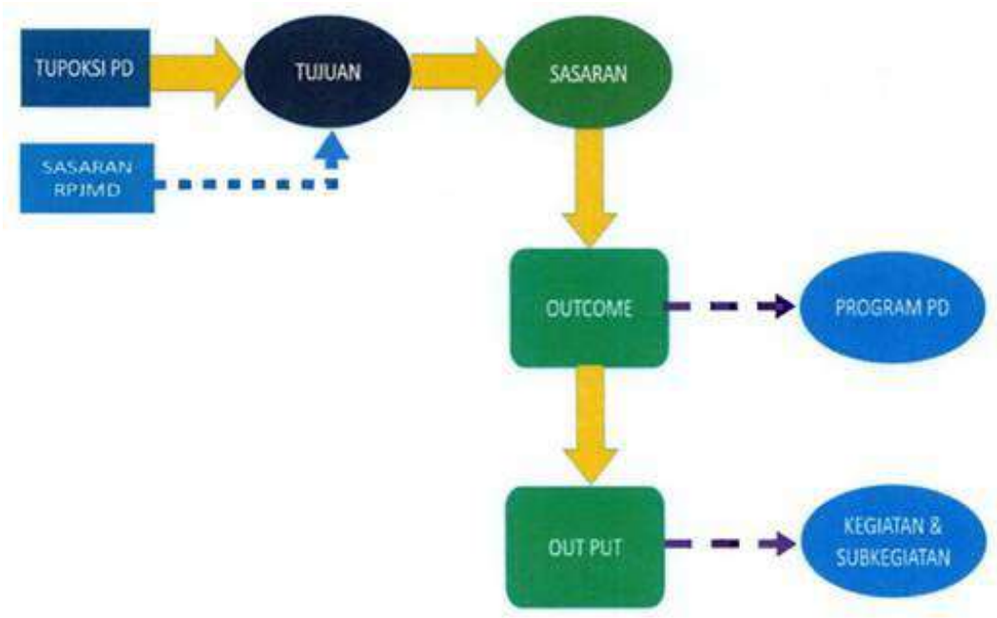

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari				Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas			Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup		Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
				Meningkatnya pemantauan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara		Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup		Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
				Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
				Terpeliharanya kebersihan sungai	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pengelolaan RTH		Presentase Ruang Terbuka Hijau	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
				Optimalisasi pengelolaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi		Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Kampung ProKlim	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan			Capain Pengelolaan Persampahan		
			Meningkatnya penanganan sampah		Persentase sampah yang tertangani	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

4.3 Sub Kegiatan

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan persiapan berbagai dokumen sebagai bahan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPRD. Target sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah menyampaikan dokumen perencanaan meliputi Draf Raperda RPPLH dan Naskah Akademik ke Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut. Sebelum disampaikan untuk proses lebih lanjut, dilakukan proses verifikasi dokumen RPPLH kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen RPPLH kabupaten/kota yang telah disiapkan dan disampaikan sejumlah 1 bendel dokumen yang terdiri dari Draf Raperda RPPLH dan Naskah Akademik.

2. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kota Yogyakarta yang akan ditetapkan pada tahun 2026. Kegiatan ini akan dimulai pada tahun 2026 apabila penetapan Draf Raperda RPPLH telah dilaksanakan pada awal tahun 2026. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sejumlah 1 dokumen dimulai tahun 2026. Sub kegiatan Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH. Pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH. Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali dengan target sejumlah 1 dokumen dan dilaksanakan tahun 2030.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS serta penetapan

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi KLHS ini disampaikan secara berkala setiap akhir tahun oleh Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun dengan target 1 dokumen dimulai Tahun 2025 - 2030.

B. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari kegiatan:
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

         Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Fasilitasi berupa rapat koordinasi terkait dokumen lingkungan, verifikasi lapangan dokumen lingkungan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan oleh tim teknis dan tim penilai.

         Indikator kinerja sub kegiatan ini Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan. Target 128 dokumen (2025), 117 dokumen (2026), 117 dokumen (2027), 117 dokumen (2028), dan 117 dokumen (2029). Penurunan target pada tahun 2025 ke tahun 2026 karena Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 menjadi sub kegiatan tersendiri sehingga tidak menjadi target sub kegiatan ini lagi pada tahun 2026-2029.
      2. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

         Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan, dan melaksanakan mekanisme teguran dan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup

         Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan yang meliputi:
   a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan meliputi:
      1. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Inventarisasi Emisi GRK dilaksanakan dengan cara pemantauan, pengumpulan dan penghitungan. Kategori kunci untuk menghitung Emisi GRK Kota Yogyakarta meliputi pendataan penggunaan energi, proses produksi, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan) dan pengelolaan limbah. Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK dengan target 1 Dokumen dimulai dari tahun 2025-2030.

2. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

   Pada sub kegiatan ini dilaksanakan :

   - Pemantauan kualitas air
   - Pemantauan kualitas udara
   - Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

   Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan target 3 Dokumen.

b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, Sosialisasi pengelolaan lingkungan, dan Survey sumber pencemar.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota dengan target 5 kegiatan pada tahun 2025 dan 3 kegiatan dimulai dari tahun 2026-2030.

2. Sub kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kegiatan pembersihan sungai secara rutin oleh tenaga kebersihan sungai, Gerakan Bersih Sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar bantaran sungai, Sosialisasi kegiatan pembersihan sungai, dan Belanja jasa tenaga kebersihan sungai.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan target 320.400 m2 pada tahun 2025-2030.

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri 1 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Survey verifikasi pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pengangkutan dan pengolahan sampah yang mengandung B3 bekerjasama dengan pihak ketiga, dan Pemantauan dropbox sampah spesifik mengandung B3.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dengan target 10 Dokumen dimulai pada tahu 2026-2030.

E. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai 1 kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah perencanaan RTH Publik kawasan permukiman, pembangunan, pemeliharaan rutin, dan rehab maupun renovasi pada RTHP untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, dalam sub kegiatan ini dilakukan inventarisasi tutupan vegetasi secara berkala sebagai bahan dasar perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang mendukung ketercapaian IKLH yang menjadi sasaran pemerintah daerah.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dilakukan pengelolaan keanekaragaman hayati lainnya berupa taman kota dan perindang yang terletak di jalur hijau. Pengelolaan tersebut meliputi aktivitas pemangkasan tanaman, penyiraman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, penggantian pohon yang mati/membahayakan, dan mitigasi kejadian pohon tumbang.

Indikator kinerja Sub Kegiatan ini adalah unit taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola dengan target 3 (tiga) unit. Tiga unit taman keanekaragaman hayati lainnya tersebut merupakan taman kota dan perindang jalur hijau yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan area pengawasan dan pemeliharaan. Zonasi taman dan perindang dijelaskan pada gambar di bawah ini :

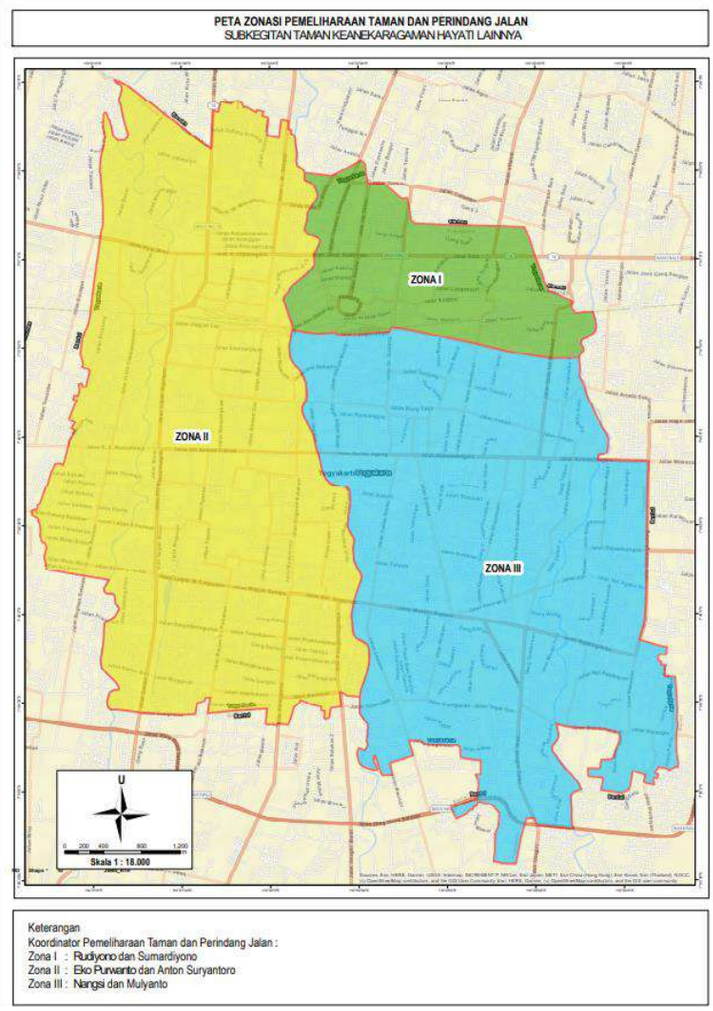

Gambar 4 2 Peta Zonasi Pemeliharaan Taman dan Perindang

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan yang meliputi:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat

         Fokus pada sub kegiatan adalah pada peningkatan pemahaman individu atau kelompok dalam isu-isu lingkungan hidup, melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan dan partisipasi.

         Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah lembaga yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan target sejumlah 15 lembaga setiap tahunnya.

G. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 1 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Fokus pada sub kegiatan terfokuskan pada penyediaan alat kerja pemungutan retribusi kebersihan pelayanan persampahan, operasional pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan pelayanan persampahan, sosialisasi terkait pelayanan persampahan dan retribusi kebersihan pelayanan persampahan, dan monitoring/pengawasan dan evaluasi kegiatan penarikan retribusi kebersihan pelayanan persampahan.

Indikator subkegiatan ini dari tahun 2025 - 2030 yaitu jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebesar 45 Kelompok. Kegiatan operasional pemungutan retribusi, sosialisasi terkait retribusi dan monitoring/pengawasan serta evaluasi pemungutan retribusi dilakukan di 45 Kelurahan.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Fokus pada sub kegiatan ini terfokuskan pada penyusunan laporan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah di 2 (dua) semester tiap tahunnya. Serta pendampingan terkait retribusi kebersihan pelayanan persampahan.

Indikator subkegiatan ini yaitu jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 dokumen Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta dari tahun 2025 - 2030.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Fokus pada sub kegiatan ini yaitu terfokuskan pada sosialisasi pengelolaan sampah kepada pelaku usaha, transporter/penggerobak, serta dilakukan pemantauan aktivitas lapangan untuk memonitoring/pengawasan dan evaluasi kinerja penggerobak.

Indikator subkegiatan ini dari tahun 2025 - 2030 yaitu Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen laporan. Sasaran sosialisasi kepada pelaku usaha sebanyak 70 orang, sosialisasi kepada transporter/penggerobak sebanyak 1000 orang.

4. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Fokus pada sub kegiatan ini yaitu terfokuskan pada sosialisasi kepada pelapak/pengepul/pengerosok dan juga dilakukan monitoring/pengawasan serta evaluasi kinerja pelapak dalam melakukan daur ulang sampah.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sampah yang terdaur ulang 20.947,35 ton/tahun di tahun 2025. Sosialisasi kepada pelapak/pengepul/ pengerosok dan monitoring/pengawasan serta evaluasi kinerja pelapak dilakukan kepada 101 pelapak/pengepul/pengerosok. Pada tahun 2026 subkegiatan ini dihapuskan, karena muatan uraian kegiatan tersebut akan digabungkan dengan subkegiatan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

   Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi koordinasi penyediaan sarana prasarana maupun tenaga kerja yang mendukung pengelolaan persampahan seperti penyapuan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

   Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

6. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

   Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi operasional sarana prasarana dalam kegiatan penanganan persampahan melalui penyediaan alat kerja dan alat pelindung diri yang mendukung penyapuan dan pengangkutan sampah.

   Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.

7. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

   Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi operasional pengolahan sampah pada unit pengolahan sampah seperti pemenuhan kebutuhan bahan bakar maupun listrik, pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah, serta pengujian lingkungan sarana pengolahan sampah.

   Indikator pada subkegiatan ini yaitu Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

8. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi pengolahan sampah pada mitra serta pemrosesan akhir pada fasilitas TPA/TPST yang saat ini berada di TPA Regional Piyungan.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

H. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah terkait proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sub kegiatan ini merujuk pada kegiatan teknis perencanaan yang menghasilkan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tiap tahunnya meliputi:

- Penyusunan Renja (tahun n+1) dan Renja Perubahan (tahun n)
- Penyusunan Renstra 5 tahunan
- Workshop inovasi perangkat daerah
- Manajemen risiko

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah bagian dari proses penganggaran daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkunagn Hidup setelah penetapan APBD, sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Dinas.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan perencanaan penganggaran setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan 2029, meliputi anggaran murni (tahun n+1), pergeseran (tahun n), dan perubahan (tahun n) Dinas Lingkungan Hidup. Proses yang dilalui meliputi:

- Penyusunan RKA
- Penyusunan DPA
- Penyusunan RKPA
- Penyusunan DPPA

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang wajib dilakukan setiap tahun untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, meliputi :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Simpelaporan
- Simoneva
- LKIP
- Perjanjian Kinerja Murni
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Pengukuran Kinerja
- Dataku
- E-Walidata
- ROPK
- Infografis
- Pohon Kinerja
- Cascading
- LPPD
- LKPJ
- SPIP
- Zona Integritas
- Kota Sehat
- Kota Layak HAM
- Data Inventarisasi P3EJ
- Dokumen GAP/ GBS PPRG

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan regulasi dari Peraturan Pemerintah. Sebanyak 166 ASN Gaji dan Tunjangan terbayarkan tepat waktu. Adapun gaji dan tunjangan yang dibayarkan meliputi :

- Gaji Pokok PNS dan PPPK
- Tunjangan Keluarga PNS dan PPPK
- Tunjangan Jabatan PNS

- Tunjangan Fungsional PNS dan PPPK
- Tunjangan Fungsional umum PNS dan PPPK
- Tunjangan Beras PNS dan PPPK
- Tunjangan PPh/ tunjangan khusus PNS dan PPPK
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK
- Iuran Jaminan Kecelakaan PNS dan PPPK
- Iuran Jaminan Kematian PNS dan PPPK
- Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
- Tambahan Penghasilan berdasar Beban Kerja PNS dan PPPK
- Tambahan Penghasilan berdasar Kondisi Kerja PNS dan PPPK
- Tambahan Penghasilan berdasar Profesi
- Tambahan Penghasilan berdasar Prestasi Kerja
- Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan koordinasi dan rapat- rapat terkait pelaksanaan tugas ASN. Target yang ingin dicapai yaitu 24 Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berdasarkan notulen hasil koordinasi.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

   Pada sub kegiatan ini akan dilakukan pengujian dan verifikasi kelengkapan, keabsahan, penghitungan lampiran SPJ serta kelengkapan lampiran SPP SPM sesuai dengan ketersediaan dana tiap Triwulan dengan target yang ingin dicapai yaitu 3000 Dokumen berdasarkan SPJ yang diajukan.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Pada sub kegiatan ini akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disusun setiap bulan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran dan Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan sehingga menghasilan 12 Dokumen.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

   Pada sub kegiatan ini dilakukan koordinasi antar unit kerja, pengumpulan data dan informasi dan penyusunan laporan akhir tahun yang berdasarkan Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Mutasi Aset, Laporan Mutasi Persediaan, Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran dan Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan sehingga tersusun 1 Dokumen Laporan Akhir tahun.

6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   Pada Sub kegiatan ini akan dilaksanakan Pengelolaan Tindak lanjut hasil audit dari BPK, Inspektorat dan auditor lainnya. Juga akan dilakukan koordinasi penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan auditor. Sehingga tersedia bahan tanggapan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk menanggapi berbagai jenis pemeriksaan

yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Target yang ditetapkan 3 Dokumen, namun target ini dapat berubah tergantung dengan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.

7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran

   Sub kegiatan ini akan melaksanakan penyusunan laporan keuangan untuk penerimaan maupun pengeluaran rutin bulanan berupa laporan fungsional, juga melakukan penyusunan laporan Triwulanan dengan reviu realisasi anggaran berdasar SPD ketersediaan dana. Untuk semesteran disusun laporan semesteran beserta Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga menghasilan 12 Laporan.

8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   Sub kegiatan ini akan dilaksanakan penyusunan Laporan Prognosis yang dilakukan pada Semester I biasanya pada bulan Juni. Laporan Prognosis yang akan disusun meliputi prediksi kinerja DLH termasuk pertumbuhan pendapatan, memproyeksikan keuangan seperti perkiraan arus kas, asset dan ekuitas termasuk juga melakukan analisis resiko dan evaluasi kinerja untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Laporan Prognosis ini menghasilkan 1 Dokumen.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Kegiataan Administrasi Barang Milik Daerah dilaksanakan meliputi:

   - Penyusunan RKBMD murni dan perubahan
   - Pengecekan dan penerimaan barang hasil pengadaan di DLH dengan menggunakan aplikasi SIMBADA untuk barang yang menjadi aset dan aplikasi SIMBARA untuk barang-barang pakai habis.
   - menyusun buku bantu pendistribusian barang diawali dengan nota permintaan barang dilanjutkan dengan surat permintaan barang, surat penyaluran permintaan barang dan berita acara serah terima penyaluran barang.
   - Untuk memantau kondisi barang di setiap ruangan menggunakan Kartu Inventaris Ruangan, dan dilakukuan penandaan barang dengan pemasangan Kode Barcode di masing-masing barang.
   - Rekonsiliasi Barang Persediaan dan Aset dilaksanakan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
   - Pengusulan penghapusan dan penyerahan barang yang rusak dan sudah tidak dimanfaatkan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Sub Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi :

      - Genset : 1 unit
      - Lift : 1 unit

- Air Conditioner : 40 unit
- Komputer : 22 unit
- Printer : 17 unit
- CCTV : 18 unit

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Sub Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung baik kantor Dinas Lingkungan Hidup maupun Bangunan Gedung yang lain milik Dinas Lingkungan Hidup seperti Gedung Laboratorium Lingkungan, Kantor Sektor dan Kantor Depo Sampah

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Sub Kegiatan ini meliputi Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas berupa bensin non subsidi kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4, solar non subsidi kendaraan roda 4 dan roda 6. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan berupa perpanjangan STNK tahunan dan lima tahunan. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Bermotor Penumpang, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dan Kendaraan Bermotor Khusus.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah diselenggarakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan metode e katalog dan pengadaan langsung.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Sub Kegiatan ini melaksanakan penyedia Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor pada Bangunan Gedung milik DLH yang meliputi sembilan (9) jenis barang antara lain: Kabel, isolasi listrik, rol kabel, klem kabel, lampu, stecker, stopkontak, batu baterai AA dan batu baterai AAA.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Sub Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 paket meliputi ATK, Bahan Perabot Kantor, Peralatan Kebersihan, Bahan Komputer, Sewa Peralatan, Kertas Cover dan Belanja Modal.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan, yang meliputi Bahan Cetak dan Fotocopy.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-undangan

   Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan, yang meliputi penyediaan Media Masa Cetak

(koran/majalah) dan pembelian buku regulasi (perundang-undangan) yang terbaru.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Sub Kegiatan ini melaksanakan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang meliputi:

   - Laporan belanja jamuan makan dan minum baik internal Dinas Lingkungan Hidup maupun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lain,
   - Laporan biaya Perjalanan Dinas untuk konsultasi dan menghadiri undangan baik ke Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

   Sub Kegiatan ini melaksanakan Belanja Bahan – Bahan Bangunan dan Konstruksi berupa bahan-bahan dalam rangka perbaikan bak kendaraan, Belanja Bahan Bakar - Bahan Bakar dan Pelumas berupa bensin non subsidi keperluan bengkel, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas meliputi gas elpiji dan gas oksigen las, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabotan Kantor berupa regulator las.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan secara rutin meliputi

   - pemantauan dan penjagaan presensi online, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, satya lancana
   - pengajuan usulan izin belajar, tugas belajar, diklat, pensiun, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan perkawinan, karis/karsu, satya lancana
   - Pencermatan SIM TPP dan pengajuan kelengkapan TPP
   - Fasilitasi penilaian E PKP dan E SKP
   - Fasilitasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja
   - Fasilitasi Survey Penilaian Integritas KPK
   - Fasilitasi kendala Jogja Smart Service
   - Fasilitasi *Employee of The Year*
   - Fasilitasi LHKPN

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang meliputi Benda Pos dan biaya pengiriman surat.

   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa meliputi 4 laporan:

      - Komunikasi berupa pembayaran telpon kantor dan bantuan komunikasi Kepala OPD dan Admin JSS
      - Sumber Daya Air
      - Listrik berupa pembayaran Listrik Gedung DLH, LAboratorium Lingkungan, RTHP yang tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta, Depo Sampah, Kantor Sektor dan Kebun Bibit.

- Pembayaran Retribusi Kebersihan dan Retribusi Air Limbah.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang meliputi;

   - Pengadaan Penyedia Jasa Orang Perseorangan pekerjaan : Penyedia Jasa Aktivitas Pengolahan data -5; Penyediaan Jasa Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya -3; Penyediaan jasa reparasi mobil -1 sampai mobil -6.
   - Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya pekerjaan : Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service); Belanja Jasa Tenaga pengamanan (Security); Pengangkutan dan Pengolahan Air Limbah B3.
   - Pajak Bumi dan Bangunan Kantor.
   - Pembayaran Jasa Aktivitas Pengolahan data -5, Jasa Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya -3, jasa reparasi mobil -1 sampai mobil -6, Jasa Kebersihan (Cleaning Service), Jasa Tenaga pengamanan (Security), Pajak Bumi dan bangunan, Biaya Pengangkutan dan Pengolahan Air Limbah B3.

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				106.602.603.874		108.462.366.726,57		111.215.557.153,18		114.023.569.221,98		117.787.860.960,33		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.300.880.272		24.486.629.074,57		25.108.099.721,18		25.768.894.949,98		26.605.763.232,33		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	21.052.221.670	A	21.480.423.858,57	A	22.025.597.017,18	A	22.598.011.920,98	A	23.323.045.435,33	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	79,47	79,67		79,77		79,87		79,97		80,07			
	Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.095.800		12.341.828,57		12.655.064,18		12.988.948,98		13.400.528,33		
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	12.095.800	4	12.341.828,57	4	12.655.064,18	4	12.988.948,98	4	13.400.528,33		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.335.300		7.484.500		7.674.456,61		7.878.903,42		8.126.531,15		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7.335.300	4	7.484.500	4	7.674.456,61	4	7.878.903,42	4	8.126.531,15		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.819.000		2.876.338,46		2.949.339,93		3.025.988,54		3.123.074,9		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	2.819.000	4	2.876.338,46	4	2.949.339,93	4	3.025.988,54	4	3.123.074,9		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.941.500		1.980.990,11		2.031.267,64		2.084.057,02		2.150.922,28		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	20	1.941.500	20	1.980.990,11	20	2.031.267,64	20	2.084.057,02	20	2.150.922,28		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.666.556.086		18.025.893.837		18.483.391.024		18.963.744.682		19.572.180.874		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	17.666.556.086	12	18.025.893.837	12	18.483.391.024	12	18.963.744.682	12	19.572.180.874		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	160		157		155		153		152			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.660.166.086		18.019.373.864		18.476.705.573		18.956.885.489		19.565.101.609		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	160	17.660.166.086	157	18.019.373.864	155	18.476.705.573	153	18.956.885.489	152	19.565.101.609		
2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				545.000		556.085		570.199		585.017		603.787		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24	545.000	24	556.085	24	570.199	24	585.017	24	603.787		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				990.000		1.010.137		1.035.774		1.062.692		1.096.788		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.000	3.000	990.000	3.000	1.010.137	3.000	1.035.774	3.000	1.062.692	3.000	1.096.788		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				960.000		979.526		1.004.387		1.030.489		1.063.552		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	960.000	12	979.526	12	1.004.387	12	1.030.489	12	1.063.552		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.680.000		1.714.171		1.757.677		1.803.356		1.861.215		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	24	24	1.680.000	24	1.714.171	24	1.757.677	24	1.803.356	24	1.861.215		
2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.150.000		1.173.391		1.203.172		1.234.440		1.274.046		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3	1.150.000	3	1.173.391	3	1.203.172	3	1.234.440	3	1.274.046		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				790.000		806.069		826.527		848.007		875.214		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	790.000	12	806.069	12	826.527	12	848.007	12	875.214		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				275.000		280.594		287.715		295.192		304.663		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.192	1	304.663		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset				0		0		0		0		0		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup				0		0		0		0		0		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				541.001.120		552.005.083		566.014.972		580.724.791		599.356.869		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	541.001.120	1	552.005.083	1	566.014.972	1	580.724.791	1	599.356.869		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.653.600		23.114.374		23.701.017		24.316.968		25.097.158		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.653.600	1	23.114.374	1	23.701.017	1	24.316.968	1	25.097.158		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				324.472.020		331.071.781		339.474.383		348.296.777		359.471.593		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	324.472.020	7	331.071.781	7	339.474.383	7	348.296.777	7	359.471.593		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.825.500		18.188.071		18.649.684		19.134.359		19.748.269		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	17.825.500	1	18.188.071	1	18.649.684	1	19.134.359	1	19.748.269		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.224.408		1.255.483		1.288.111		1.329.439		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.200.000	1	1.224.408	1	1.255.483	1	1.288.111	1	1.329.439		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174.850.000		178.406.449		182.934.405		187.688.576		193.710.410		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	174.850.000	3	178.406.449	3	182.934.405	3	187.688.576	3	193.710.410		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.495.744.664		2.546.508.110		2.611.138.486		2.678.997.783		2.764.951.230		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.495.744.664	12	2.546.508.110	12	2.611.138.486	12	2.678.997.783	12	2.764.951.230		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.530.510		1.569.354		1.610.139		1.661.799		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.530.510	1	1.569.354	1	1.610.139	1	1.661.799		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				128.250.000		130.858.605		134.179.796		137.666.914		142.083.844		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	128.250.000	4	130.858.605	4	134.179.796	4	137.666.914	4	142.083.844		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.365.994.664		2.414.118.995		2.475.389.336		2.539.720.730		2.621.205.587		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.365.994.664	12	2.414.118.995	12	2.475.389.336	12	2.539.720.730	12	2.621.205.587		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.824.000		343.675.000		352.397.471		361.555.716		373.155.934		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	99	102	336.824.000	102	343.675.000	102	352.397.471	102	361.555.716	102	373.155.934		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.824.000		119.200.200		122.225.501		125.401.946		129.425.364		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	99	102	116.824.000	102	119.200.200	102	122.225.501	102	125.401.946	102	129.425.364		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000		224.474.800		230.171.970		236.153.770		243.730.570		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	220.000.000	1	224.474.800	1	230.171.970	1	236.153.770	1	243.730.570		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	3.248.658.602	A	3.006.205.216	A	3.082.502.704	A	3.170.883.029	A	3.282.717.797	2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan	
	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	79,47	79,67		79,77		79,87		79,97		80,07			
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.787.000		1.439.807		1.476.350		3.401.048		5.839.222		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	70.787.000	1	1.439.807	1	1.476.350	1	3.401.048	1	5.839.222		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				68.851.000		1.400.429		1.435.972		3.308.031		5.679.259		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	68.851.000	1	1.400.429	1	1.435.972	1	3.308.031	1	5.679.259		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.936.000		39.378		40.378		93.017		159.963		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	1.936.000	3	39.378	3	40.378	3	93.017	3	159.963		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.744.000		4.835.713		4.958.443		11.472.003		19.610.606		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	237.744.000	12	4.835.713	12	4.958.443	12	11.472.003	12	19.610.606		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				237.744.000		4.835.713		4.958.443		11.472.003		19.610.606		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	237.744.000	12	4.835.713	12	4.958.443	12	11.472.003	12	19.610.606		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.940.127.602		2.999.929.696		3.076.067.911		3.156.009.978		3.257.267.969		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	182	179	2.940.127.602	177	2.999.929.696	175	3.076.067.911	173	3.156.009.978	173	3.257.267.969		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				37.407.902		38.168.677		39.137.398		40.154.516		41.442.841		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	37.407.902	1	38.168.677	1	39.137.398	1	40.154.516	1	41.442.841		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.902.719.700		2.961.761.019		3.036.930.513		3.115.855.462		3.215.825.128		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	182	179	2.902.719.700	177	2.961.761.019	175	3.036.930.513	173	3.115.855.462	173	3.215.825.128		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				447.345.000		456.443.701		468.443.701		389.571.912		497.307.677		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Persentase)	78,5	79,5	447.345.000	80	456.443.701	80,5	468.443.701	81	389.571.912	81	497.307.677	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				156.235.000		159.511.500		167.791.201		140.119.412		241.369.412		
Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	101.345.000	1	159.511.500	1	167.791.201	1	140.119.412	1	241.369.412		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				101.345.000		159.511.500		167.791.201		140.119.412		140.119.412		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	101.345.000	1	159.511.500	1	167.791.201	1	140.119.412	1	140.119.412		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0		0		0		0		101.250.000		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101.250.000		
Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	54.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				54.890.000		0		0		0		0		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	54.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				291.110.000		296.932.201		300.652.500		249.452.500		255.938.265		
Meningkatnya pemantauan KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2	3	291.110.000	3	296.932.201	3	300.652.500	3	249.452.500	3	255.938.265		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		150.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				291.110.000		96.932.201		300.652.500		99.452.500		255.938.265		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2	3	291.110.000	3	96.932.201	3	300.652.500	3	99.452.500	3	255.938.265		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		200.000.000		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				3.597.674.740		3.670.848.760		3.764.014.901		3.861.835.679		3.985.739.596		
Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku (Persentase)	53,51	61,4	268.440.400	62,28	273.897.793	63,16	280.849.319	64,04	288.148.214	65,78	297.393.301	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				368.997.500		376.500.224		386.055.800		396.088.843		408.797.116		
Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	3	268.440.400	3	273.897.793	3	280.849.319	3	288.148.214	3	297.393.301		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				268.440.400		273.897.793		280.849.319		288.148.214		297.393.301		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	3	268.440.400	3	273.897.793	3	280.849.319	3	288.148.214	3	297.393.301		
Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku (Persentase)	53,51	61,4	1.059.308.540	62,28	1.080.854.876	63,16	1.108.286.972	64,04	1.137.089.572	65,78	1.173.572.158	2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium Lingkungan	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.059.308.540		1.080.854.876		1.108.286.972		1.137.089.572		1.173.572.158		
Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.059.308.540	2	1.080.854.876	2	1.108.286.972	2	1.137.089.572	2	1.173.572.158		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				1.059.308.540		1.080.854.876		1.108.286.972		1.137.089.572		1.173.572.158		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.059.308.540	2	1.080.854.876	2	1.108.286.972	2	1.137.089.572	2	1.173.572.158		
Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup (Persentase)	82,5	84,17	2.269.925.800	85	2.316.096.091	85,84	2.374.878.610	86,67	2.436.597.893	87,5	2.514.774.137	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				368.997.500		376.500.224		386.055.800		396.088.843		408.797.116		
Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.557.100	1	102.602.431	1	105.206.481	1	107.940.629	1	111.403.815		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				100.557.100		102.602.431		105.206.481		107.940.629		111.403.815		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.557.100	1	102.602.431	1	105.206.481	1	107.940.629	1	111.403.815		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.169.368.700		2.213.493.660		2.269.672.129		2.328.657.264		2.403.370.322		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	5	3	173.049.100	3	176.568.919	3	181.050.238	3	185.755.443	3	191.715.254		
2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				173.049.100		176.568.919		181.050.238		185.755.443		191.715.254		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	5	3	173.049.100	3	176.568.919	3	181.050.238	3	185.755.443	3	191.715.254		
Terpeliharanya kebersihan sungai	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	320.400	320.400	1.996.319.600	320.400	2.036.924.741	320.400	2.088.621.891	320.000	2.142.901.821	320.400	2.211.655.068		
2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1.996.319.600		2.036.924.741		2.088.621.891		2.142.901.821		2.211.655.068		
pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	320.400	320.400	1.996.319.600	320.400	2.036.924.741	320.400	2.088.621.891	320.000	2.142.901.821	320.400	2.211.655.068		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				14.983.919.077		15.288.691.991		15.676.718.993		16.084.561.355		16.601.151.680		
Meningkatnya pengelolaan RTH	Presentase Ruang Terbuka Hijau (Persentase)	23,329	23,334	14.983.919.077	23,335	15.288.691.991	23,337	15.676.718.993	23,338	16.084.561.355	23,34	16.601.151.680	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				14.983.919.077		15.288.691.991		15.676.718.993		16.084.561.355		16.601.151.680		
Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2	3	7.741.762.372	3	7.899.229.819	3	8.099.712.271	3	8.310.210.790	3	8.576.837.086		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				7.741.762.372		7.899.229.819		8.099.712.271		8.310.210.790		8.576.837.086		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2	3	7.741.762.372	3	7.899.229.819	3	8.099.712.271	3	8.310.210.790	3	8.576.837.086		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Optimalisasi pengelolaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,34	3,3951	7.242.156.705	3,4451	7.389.462.172	3,4951	7.577.006.722	3,5451	7.774.350.565	3,5951	8.024.314.594		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.242.156.705		7.389.462.172		7.577.006.722		7.774.350.565		8.024.314.594		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,34	3,3951	7.242.156.705	3,4451	7.389.462.172	3,4951	7.577.006.722	3,5451	7.774.350.565	3,5951	8.024.314.594		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 (Persentase)	17,58	19,07	30.662.500	19,65	31.286.155	20,23	32.080.256	20,79	32.952.378	21,33	34.087.107	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)		10	30.662.500	10	31.286.155	10	32.080.256	10	32.952.378	10	34.087.107		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)		10	30.662.500	10	31.286.155	10	32.080.256	10	32.952.378	10	34.087.107		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Elektronik (Online Single Submission)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup (Persentase)	32,71	33,43	31.686.000	33,57	32.330.493	33,7	33.151.041	33,83	34.012.583	33,92	35.103.849	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	34	34	31.686.000	35	32.330.493	35	33.151.041	35	34.012.583	35	35.103.849		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				31.686.000		32.330.493		33.151.041		34.012.583		35.103.849		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	34	34	31.686.000	35	32.330.493	35	33.151.041	35	34.012.583	35	35.103.849		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kabupaten/Kota yang diawasi														
Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan (%)	78,67	79,8	463.545.000	80,27	472.973.505	80,72	484.977.573	81,16	497.581.361	81,59	513.545.851		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	156	117	463.545.000	117	472.973.505	117	484.977.573	117	497.581.361	117	513.545.851		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				463.545.000		472.973.505		484.977.573		497.581.361		513.545.851		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	156	117	463.545.000	117	472.973.505	117	484.977.573	117	497.581.361	117	513.545.851		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Kampung ProKlim (Persentase)	65,09	68,05	1.363.481.500	71,01	1.391.214.714	73,96	1.426.523.743	76,92	1.463.596.805	79,88	1.510.555.108	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata (Persentase)	69,35	79,68		81,29		82,9		84,52		86,13			
	Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) (Persentase)	73,92	78,69		80,82		82,91		84,98		87,02			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	1.061	1.363.481.500	1.076	1.391.214.714	1.091	1.426.523.743	1.106	1.463.596.805	1.121	1.510.555.108		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	1.061	1.363.481.500	1.076	1.391.214.714	1.091	1.426.523.743	1.106	1.463.596.805	1.121	1.510.555.108		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya penanganan sampah	Persentase sampah yang tertangani (Persentase)	65,12	67,15	59.588.872.035	67,78	60.800.909.685	68,4	62.344.036.815	69,03	63.964.258.309	69,66	66.016.499.090	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah		9	59.588.872.035	9	60.800.909.685	9	62.344.036.815	9	63.964.258.309	9	66.016.499.090		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)													
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		1		1		1		1		1			
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)		86		86		86		86		86			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)		1		1		1		1		1			
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				28.062.432.300		28.633.222.200		29.359.933.400		30.122.950.900		31.089.421.150		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)		9	28.062.432.300	9	28.633.222.200	9	29.359.933.400	9	30.122.950.900	9	31.089.421.150		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				4.117.321.375		4.201.067.600		4.307.690.700		4.419.640.750		4.561.441.300		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)		86	4.117.321.375	86	4.201.067.600	86	4.307.690.700	86	4.419.640.750	86	4.561.441.300		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17.522.046.460		17.878.444.885		18.332.199.815		18.808.624.259		19.412.083.540		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		1	17.522.046.460	1	17.878.444.885	1	18.332.199.815	1	18.808.624.259	1	19.412.083.540		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				9.887.071.900		10.088.175.000		10.344.212.900		10.613.042.400		10.953.553.100		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)		1	9.887.071.900	1	10.088.175.000	1	10.344.212.900	1	10.613.042.400	1	10.953.553.100		
Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase sampah yang terkurangi (Persentase)	18,95	19,16	1.794.537.750	19,24	1.831.038.648	19,31	1.877.510.409	19,39	1.926.303.890	19,46	1.988.107.770		
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	1.794.537.750	1	1.831.038.648	1	1.877.510.409	1	1.926.303.890	1	1.988.107.770		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		45		45		45		45		45			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				1.404.846.250		1.433.420.823		1.469.801.043		1.507.998.813		1.556.381.718		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		45	1.404.846.250	45	1.433.420.823	45	1.469.801.043	45	1.507.998.813	45	1.556.381.718		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				24.480.000		24.977.923		25.611.863		26.277.474		27.120.565		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	24.480.000	1	24.977.923	1	25.611.863	1	26.277.474	1	27.120.565		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				365.211.500		372.639.902		382.097.503		392.027.603		404.605.487		
Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	365.211.500	1	372.639.902	1	382.097.503	1	392.027.603	1	404.605.487		

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah memiliki Program Prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Adapun Program Prioritas Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dijabarkan pada matriks berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	- Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten/Kota - Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	**2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya penetapan RPPLH kabupaten/kota	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
			Meningkatnya pemantauan KLHS	**2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	
			Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi KLHS	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
				2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
				2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
2.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	- Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca - Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara secara berkala	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			Terlaksananya pengujian air dan udara	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			- Terpeliharanya kebersihan Sungai - Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	**2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	
			Terlaksananya pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
3.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	- Meningkatnya luas tutupan vegetasi - Optimalisasi pengelolaan RTH	**2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	
			- Terkelolanya RTHP lingkungan permukiman - Tersusunnya dokumen DED RTHP - Terbangunnya RTHP lingkungan permukiman di lokasi baru	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Terkelolanya taman keanekaragaman hayati lainnya	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)**	Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	**2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3**	
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
5.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Terlaksananya monitoring kepatuhan pelaku usaha dan/atau	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
6.	**Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan**	**2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	**2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
7.	**Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah**	**2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan**	Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	**2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah**	
			Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			Tersedianya rencana kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan,	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pengurangan sampah (masyrakat, pelaku usaha/kegiatan, pelaku daur ulang)	verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Terlaksananya pendataan pengumpulan dan penanganan sampah pada fasilitas Depo/ TPS/ Transfer Point/UPS	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Terlaksananya kerjasama penanganan sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Terlaksananya kegiatan daur ulang sampah	2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									

2.	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	73,33	76,67	77,32	77,97	77,62	79,27	80,09	
3.	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase	62,6	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	71,06	
4.	Capain Pengelolaan Persampahan	Persentase	84,06	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	89,12	
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Di samping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Dinas LIngkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	positif	Indeks	55.53	55.42	57.5	57.58	57.66	57.73	57.81	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	positif	Persentase	50	33.30	33.43	33.57	33.70	33.83	33.92	
4.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	positif	Persentase	84.06	85.62	86.32	87.02	87.72	88.42	89.12	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi dan Misi RPJMD, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029, dan isu strategis aktual.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif dan kebutuhan anggaran telah disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk menunjang visi dan misi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Perhitungan kebutuhan disesuaikan standarisasi harga barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika Pembangunan Daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan yang baik, sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai. Sehingga, dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197303021992031004

LAMPIRAN 1

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

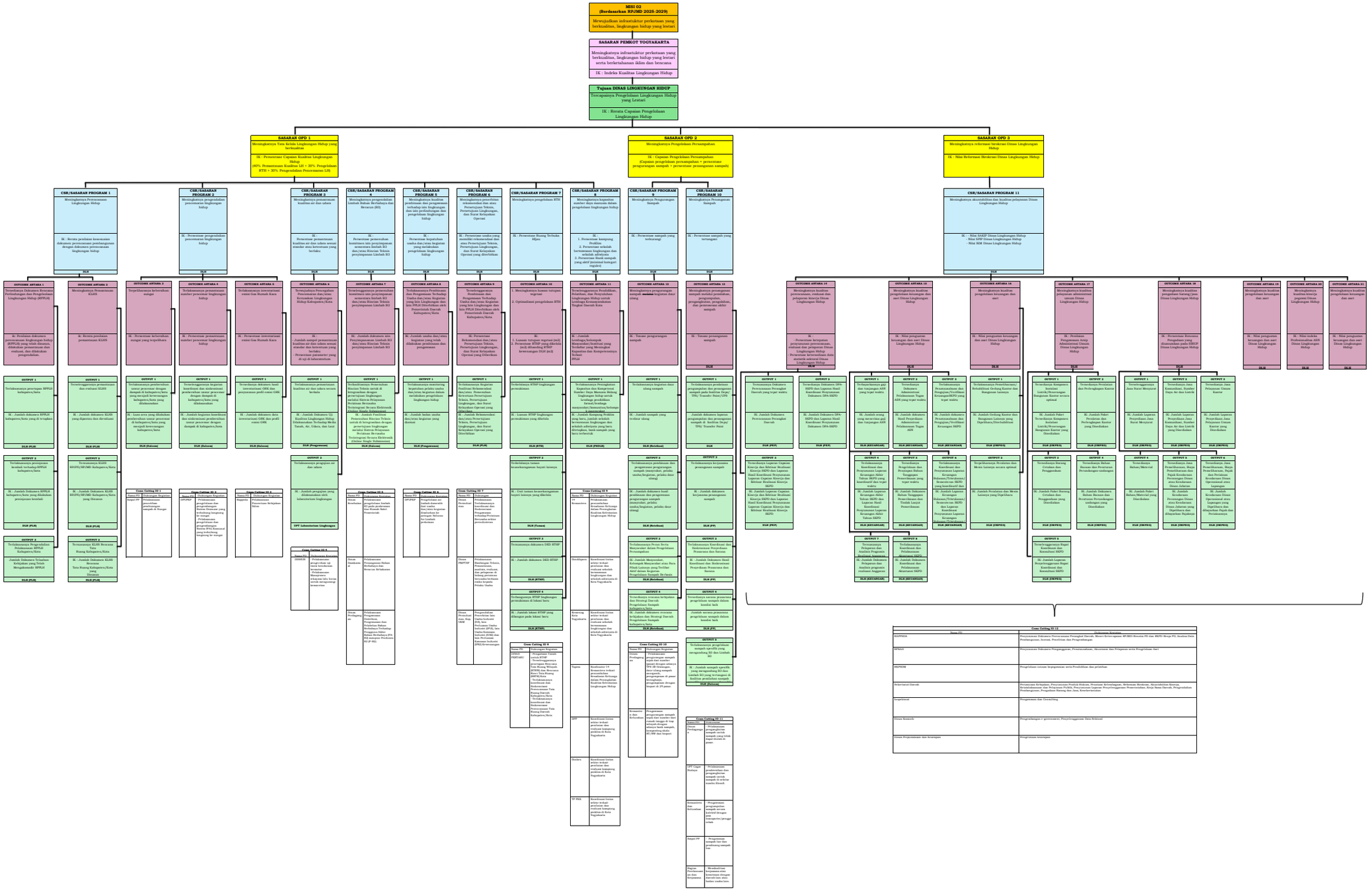

Cross Cutting ID 12	
Nama PD	Dokumen Rencana
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Master Keterangsinan RPJMD Rincian PD dan RKPD Rincin PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
SEKPRIM	Pengelolaan urusan kerjasamaan serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Penyusunan Kebijakan, Penyelenggaran Protokol, Hukum, Pemdam Keterangsian, Sekretaris Berdaerah, Sinyaldidaerah Sinergi, Pemberdayaan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaran Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengelolaan Barang dan Jasa, Keterkerintahan
Inspektorat	Pengawasan dan Controlling
Dinas Kesearah	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Terkunci
Dinas Perpustakaan dan Kearsipanan	Pengelolaan dokumentasi dan informasi

Cross Cutting ID 13	
Nama PD	Dokumen Rencana
Dinas Perindagkop dan UKM	- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sampah untuk sampah yang telah dapat dimanfaatkan
UPT Cagar Budaya	Pelaksanaanan pemberdayaan dan pengawasan sampah untuk sampah di sekitar wisata khusnya
Kesatuanbina Ban Kebangsaan	Pengawasan pengawasan pengelolaan sampah aktivitas dan pengawasan sampah
Kapanewon	Pengawasan dan pengendalian sampah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan	- Mendukung kerjasamaan atau kesaciaan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah

LAMPIRAN 2

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

No	Status Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Baseline	Target						Penanggung-jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Baseline 2024	Target Kegiatan (2025)	Target Kegiatan (2026)	Target Kegiatan (2027)	Target Kegiatan (2028)	Target Kegiatan (2029)	Target Kegiatan (2030)	Penanggung-jawab	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Sub Kegiatan (2025)	Target Sub Kegiatan (2026)	Target Sub Kegiatan (2027)	Target Sub Kegiatan (2028)	Target Sub Kegiatan (2029)	Target Sub Kegiatan (2030)	Penggenap
I		**Tulis Tujuan pada Pohon Kinerja OPD (boleh lebih dari satu) sesuaian jika bisa dijanjangkau**	**Tulis Indikator Kinerja Tujuan pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator tujuan**	**Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator sasaran**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Tulis Nama Program yang diambil dari Kegiatan 900**	**Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator program**		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program**	**Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kegiatan 900**	**Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan**								**Tulis Nama Bidang/Sekid Yang mengampu indikator kegiatan**	**Tulis Nama Sub-kegiatan yang diambil dari Kegiatan 900**	**Tulis Sasaran Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja**								**Tulis Nama Sekid/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan**	
	Dinas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Pengelolaan lingkungan Hidup yang lestari	Resiu Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian kualitas lingkungan hidup = Capaian pengelolaan lingkungan hidup x 0,4	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	(80% Persentasi Kualitas Lik + 20% Pengelolaan Limbah B3) : Persentasi Lik	62,96	63,21	63,47	64,52	64,58	65,08	Program Perlindungan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perlindungan lingkungan Hidup	Resiu pencilaian keterwujudan dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui dengan dokumen lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui dengan dokumen lingkungan hidup (DLH) + dokumen RPPLH) dibagi jumlah dokumen lingkungan hidup	persen	78,5%	79%	79,20%	79,40%	80,50%	80,80%	80,80%	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terwujudnya dan ketersediaanya RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan penyusun RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah sebajan perencanaan dan penyusun RPPLH Kabupaten/Kota yang telah disusun	80%	79%	100%	-	-	-	-	Bidang PPLH/Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			1 dokumen	-	-	-	-	-	-	Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup/Magelang Ir. Penyang Hardz, S.T., M.T.
																	Rumber data: Perolehan nangai yg terpelihara = (Panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta + 100%) --> 100%. Presentasenya dari (Jumlah sumber pencemar yang dicji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta) x 100% --> 100%. Investasinya Suvai Dan Rumah Sara = (Jumlah sekior rumo DRI yang dilaporkan di aplikasi Sigo Smart KLHK / Jumlah total sekior rumo DRI) 100% --> 100%.																																							
														Program Perlindungan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	(20%Persentasi terlaksana nangai yg terpelihara + 20%Persentasi pencemaran sumber tidak bergerak + 20%Persentasi Investasinya Suvai Dan Rumah Sara) x (100)			82,50%	85,38%	86,17%	89,00%	90,48%	96,67%	97,50%	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencemaran sumber tidak bergerak	Persentase pencemaran sumber tidak bergerak yang dicji kualitasnya	(Jumlah sumber pencemar yang dicji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dapat dipantau) x 100%	65,00%	66,67%	68,33%	75,00%	71,67%	73,33%	75,00%	Bidang PPLH/Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rumbukmas dan Sinkronisasi Pemberlakuan Baku Mutu di kabupaten/kota	Terwujudnyanya kegiatan bumbukmas dan sinkronisasi pemberlakuan mutu di kabupaten/kota yang diverifikasi	Jumlah kegiatan bumbukmas dan sinkronisasi pemberlakuan mutu di kabupaten/kota	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran DR
																	Rumber data: Perolehan nangai yg terpelihara = (Panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta + 100%) --> 100%. Presentasenya dari (Jumlah sumber pencemar yang dicji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta) x 100% --> 100%. Investasinya Suvai Dan Rumah Sara = (Jumlah sekior rumo DRI yang dilaporkan di aplikasi Sigo Smart KLHK / Jumlah total sekior rumo DRI) 100% --> 100%. Sirvenagan: Rumber pencemar yang dipantau berasal dari 1 Sektor Sama DRI yang dilaporkan di aplikasi Sigo Smart+ Sektor Energi, sektor DPPU, Sektor Limbah, dan Sektor Pangan Sektor Rumo DRI sesiapati Sektor Energi, Sektor DPPU, Sektor Limbah, dan Sektor Pangan Sektor Rumo DRI Peraturan Menteri Nl Tahun 2021).																																							
																	Rumber data: Perolehan nangai yg terpelihara = (Panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta + 100%) --> 100%. Presentasenya dari (Jumlah sumber pencemar yang dicji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta) x 100% --> 100%. Investasinya Suvai Dan Rumah Sara = (Jumlah sekior rumo

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Baseline	Target						Penanggung-jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Baseline 2024	Target Kegiatan (2025)	Target Kegiatan (2026)	Target Kegiatan (2027)	Target Kegiatan (2028)	Target Kegiatan (2029)	Target Kegiatan (2030)	Penanggung-jawab	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Sub Kegiatan (2025)	Target Sub Kegiatan (2026)	Target Sub Kegiatan (2027)	Target Sub Kegiatan (2028)	Target Sub Kegiatan (2029)	Target Sub Kegiatan (2030)	Penggabung
1								2025	2026	2027	2028	2029	2030						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																				
		Tulis Tujuan pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dengan sasaran jika bisa dijelaskan)	**Tulis Indikator Kinerja Tujuan pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator tujuan**	**Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator sasaran**							**Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/Cliff pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/Cliff pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator program**									**Tulis Nama Bidang Yang menggunga indikator program**	**Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan**								**Tulis Nama Bidang/Subid Yang menggunga indikator kegiatan**	**Tulis Nama Sub kegiatan yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja**								**Tulis Nama Perangkat Daerah Yang menggunga indikator subkegiatan**
														Program Pengelolaan Sektor Perikanan dan Jumlah Sektor Perikanan dan Jumlah Sektor Perikanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas pemberian dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah total cara Penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO yang telah dilaksanakan) / (Jumlah total cara lingkungan dan/atau lokasi penyimpanan yang telah ditetapkan) x 100%			0	19,25%	39,63%	23,23%	20,79%	21,23%	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan sumberdaya Lokasi SO	Terselenggaranya pemerintahan kabupaten atau penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO	Jumlah dokumen cara Penyimpanan dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO	Jumlah total cara Penyimpanan Lokasi SO dan/atau penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi		-	225	239	249	259	269	Bidang PPLH/Unit Pengelolaan Pesawaran Lingkungan Hidup	Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan melalui Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Elektronik (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terintegrasi)	Terlaksanakannya Pemerintahan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten dengan penyimpan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO	Jumlah Pemkiman Pemerintahan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten dengan penyimpan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi	10 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Kevisa Tim Kerja Pengendalian dan Pencemaran Lh
																				Rumber data: Pemkiman /pemerintahan 10) Jumlah cara/lokasi yang ternyata/ (ata Penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO = 219 Proyeksi: (pemerintahan 10) Jumlah Total cara/lokasi yang ternyata/ (ata lingkungan dan/atau penyimpan lingkungan = 1186 | | Rumber data: Pemkiman /pemerintahan 10) Jumlah cara/lokasi yang ternyata/ (ata Penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO = 219 Proyeksi: (pemerintahan 10) Jumlah Total cara/lokasi yang ternyata/ (ata lingkungan dan/atau penyimpan lingkungan = 1203 | | Rumber data: Pemkiman /pemerintahan 10) Jumlah cara/lokasi yang ternyata/ (ata Penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO = 219 Proyeksi: (pemerintahan 10) Jumlah Total cara/lokasi yang ternyata/ (ata lingkungan dan/atau penyimpan lingkungan = 1220 | | Rumber data: Pemkiman /pemerintahan 10) Jumlah cara/lokasi yang ternyata/ (ata Penyimpanan Lokasi SO dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Lokasi SO = 219 Proyeksi: (pemerintahan 10) Jumlah Total cara/lokasi yang ternyata/ (ata lingkungan dan/atau penyimpan lingkungan = 1234																															
														Program Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Jata dan/atau Kegiatan yang Berdampak dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas pemkiman dan pengawasan terhadap jata dan/atau kegiatan yang berdampak dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilaksa dan dinawasi) / (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib dinawasi) * 100%			33,30	33,43	33,57	33,70	33,83	33,92	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah dilaksa dan dinawasi oleh pengawasan.	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah dilaksa dan dinawasi	329 usaha	331 usaha	334	337	393	393	396	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan Perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksanakannya monitoring terpaduan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap Perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laoku usaha dan/atau kegiatan yang dinawasi	55 laoku usaha	55 laoku usaha	64	55	55	55	55	Kevisa Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup, S.T., M.Eng.
															Meningkatnya kualitas pemkiman dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2. Persentase usaha yang mematuhi ketentuan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Jumlah usaha yang mematuhi ketentuan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) / (Jumlah usaha yang telah dinawasi) x 100%	78,67	79,32	79,8	80,27	80,74	81,16	81,59	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (Jumlah Dokumenvokumen dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap dan benar) / (Jumlah total usaha) x 100%	(Jumlah Dokumenvokumen dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap dan benar) / (Jumlah total usaha) x 100%	78,67%	79,32%	79,80%	80,27%	80,74%	81,16%	81,59%	Bidang PPLH	Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Kegiatan Pemkiman dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah Dokumenvokumen dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap dan benar	326 dokumen	328 dokumen	117 dokumen	117 dokumen	117 dokumen	117 dokumen	117 dokumen	Kevisa Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup, S.T., M.T.
																												Jumlah Dokumenvokumen dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Lokasi SO yang telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap dan benar dan telah diverifikasi	3258	3486	3602	3723	3837	3954	4077																
																												Jumlah total usaha	4811	4956	7021	7126	7221	7336	7441																
														Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya pengelolaan KHD	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau = Luas Ruang Terbuka Hijau Privat + Luas Ruang Terbuka Hijau Public) / (Luas Area Yogyakarta) x 100%			23,19%	23,332%	23,326%	23,325%	23,337%	23,338%	23,343%	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya luas tutupan vegetasi	1. Luasan tutupan vegetasi (ha))	1. Luasan tutupan vegetasi yang terjaga/ upaya dan lestarinya ruta savana berkala.	606.370.053 Ha	606.2708130 ha	606.4265534 ha	606.5783033 ha	606.5283033 ha	606.5283033 ha	606.6283033 ha	Bidang Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksanakan RTHP lingkungan permukiman	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	5,39 ha	5,3951 ha	5,3951 ha	5,3951 ha	5,8951 ha	5,3951 ha	5,3951 ha	Kevisa Tim Kerja Ruang Terbuka Hijau,Pasrkerind ustri, Pasar Hidup, S.T., M.Sos
																												2. (RTHP yang dikelola/RTHP keseluruhan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																
																												Target kawaskan kumun 500m2	Target kawaskan kumun 500m2	Target kawaskan kumun 500m2	Target kawaskan kumun 500m2	Target kawaskan kumun 500m2	Target kawaskan kumun 500m2																				
																												Terkoordinasinya Pemkiman, Pelatihan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk Lestarinya Ekosistemvokuman Tingkat Daerah Kota	Terselenggaranya Pemkiman, Pelatihan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk Lestarinya Ekosistemvokuman Tingkat Daerah Kota	Jumlah Lestarinya Ekosistemvokuman yang Terdaftar yang Mewangkat Kapasitas Pengelolaan Ekosistemvokuman	Terlaksanakannya Pemkiman, Pelatihan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk Lestarinya Ekosistemvokuman Tingkat Daerah Kota																		

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Baseline	Target						Penanggung-jawab	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Baseline 2024	Target Kegiatan (2025)	Target Kegiatan (2026)	Target Kegiatan (2027)	Target Kegiatan (2028)	Target Kegiatan (2029)	Target Kegiatan (2030)	Penanggung-jawab	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Sub Kegiatan (2025)	Target Sub Kegiatan (2026)	Target Sub Kegiatan (2027)	Target Sub Kegiatan (2028)	Target Sub Kegiatan (2029)	Target Sub Kegiatan (2030)	Penanggung-jawab
1																																																
	Tulis Nama Perangkat Daerah	**Tulis Tujuan pada Pohon Kinerja OPD (boleh kosong dengan asumsi jika bisa dijanjangkan)**	**Tulis Indikator Kinerja Tujuan pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator tujuan**	**Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator sasaran**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator program**			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Tulis Nama Bidang Yang menyangga indikator program**	**Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan**		**Tuliskan target yang akan dicapai**						**Tulis Nama Bidang/Subid Yang menangani indikator kegiatan**	**Tulis Nama Sub-kegiatan yang diambil dari Kepmen 900**	**Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja**		**Tuliskan target yang akan dicapai**						**Tulis Nama Bidang/Subid Yang menangani indikator sub-kegiatan**
															Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase sampah yang ditangani	(Jumlah sampah yang ditangani/Jumlah sampah yang ditimbulkan sampah)x 100%			66,32	66,32	67,15	67,78	68,40	69,03	69,66	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pelayanan sampah melalui pewadahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Timbunan pelayanan sampah	Jumlah sampah yang ditangani dari pewadahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dalam satu tahun		733502 ton/tahun	776113.2 ton/tahun	781226.4 ton/tahun	785924.6 ton/tahun	791012.8 ton/tahun	795961 ton/tahun	Bidang Pengelolaan Persampahan	Pengumpulan sampah dari sumber sampah	Terlaksananya kegiatan dan sarana pengumpulan sampah	Jumlah sampah yang ditangani dari sumber sampah		170,81	262,24	168,97	211,01	216,37	222,43	Kepala Tim Kerja Operasional Pengelolaan Persampahan, S.Si., M.Si
					Meningkatnya cakupan layanan Sistem Drainase Lingkungan Hidup	Nilai Sistem dan Manfaat Drainase Lingkungan Hidup	Hasil Evaluasi Sistem dan Manfaat sesuai Ketentuan	A(87,33-90,33)	A(87,33-90,33)	A(87,33-90,33)	A(87,33-90,33)	A(87,33-90,33)	A(87,33-90,33)			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat		A (82,80)	A (82,93-83,93)	A (82,93-83,93)	A (83-84)	A (83,20-84,03)	A (83,13-84,13)	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	1. Persentase penyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang disusun sesuai tepat waktu (Ring) (nomik) 2. Persentase penyusunan evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai) dokumen(SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat/ Tenaga PBP	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	6	6	6	6	6	6	6	Kepala Tim Kerja PBP/Ulfah Yunnyt, S.E., M.Si.
														Program Pemenuhan Upaya Pencerdasan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Terbelalu dan Tivralue	Terbelalu dan Tivralue	Terbelalu dan Tivralue	Terbelalu dan Tivralue	Terbelalu dan Tivralue	Terbelalu dan Tivralue				Kepala Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat/ Tenaga PBP	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Lingkup Dinas/ Rancangan Perjanjian Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Lingkup Dinas/ Laporan Hasil Rancangan Perjanjian Dokumen DPA-SKPD	4	4	4	4	4	4	4	Kepala Tim Kerja PBP/Ulfah Yunnyt, S.E., M.Si.
																Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			79,37	79,47	79,77	79,87	79,97	80,07																													
																	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset									Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaporkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103 orang	167 orang	140 orang	137 orang	233 orang	153 orang	152 orang	Sripsih Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi, S.E.
																																					Pengelolaan Administrasi Perkantoran Tugas ASN	Terselenggara Dokumen Administrasi Perkantoran Tugas ASN yang tepat waktu	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Perkantoran Tugas ASN	12 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	
																																					Pelaksanaan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengajuan/Verifikasi Barangmil/BMD yang tepat waktu	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengajuan/Verifikasi Barangmil/BMD yang tepat waktu	Jumlah dokumen Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengajuan/Verifikasi Barangmil/BMD yang tepat waktu	1800 dokumen	2000 dokumen	2000 dokumen	2000 dokumen	2000 dokumen	2000 dokumen	2000 dokumen	
																																					Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor yang tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
																																					Pengelolaan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tepat waktu	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tepat waktu	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	
																																				Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
																																				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai pengantan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan pengelolaan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 1 – 2: Kurang Nilai 3 – 5: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat																		

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Baseline	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Baseline 2024	Target Kegiatan (2025)	Target Kegiatan (2026)	Target Kegiatan (2027)	Target Kegiatan (2028)	Target Kegiatan (2029)	Target Kegiatan (2030)	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Sub Kegiatan (2025)	Target Sub Kegiatan (2026)	Target Sub Kegiatan (2027)	Target Sub Kegiatan (2028)	Target Sub Kegiatan (2029)	Target Sub Kegiatan (2030)	Pengampu
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dengan sasaran jika bisa dijanjangkan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	Tulis Sasaran Strategis /Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Strategis /Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 900	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 900	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan								Tulis Nama Bidang/Sekti Yang mengampu indikator kegiatan	Tulis Nama Sub-kegiatan yang diambil dari Kepmen 900	Sasaran Operasional	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja OPD								Tulis Nama Sub-Bagian Unsur dan Kepengawasan (Wajib) yang Mengampu Sub-Kegiatan
																																					Perencanaan, Penelitian dan Pengawasan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lainnya	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Sekretariat	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lainnya	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian (Wajib) yang Mengampu Sub-Kegiatan
																																					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lainnya	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta dan Moves Lainnya yang Dipelihara	99 unit	99 unit	102 unit	102 unit	102 unit	102 unit	102 unit														
																										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai pengadaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan indikator: Nilai 0: Tanpat Jack Nilai 1: 0 - Kuik Nilai 2: Kuik Nilai 3: Baruk	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat																									
																										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Persiapan Pengawasan Lingkungan Hidup Umum Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian pengawasan emisi administrasi umum	96,17	96,67	96,37	96,97	96,67	96,67	96,77	Sekretariat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	Terselenggaranya kawalan Lainnya/Penyusun Rangsan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya/Penyusunan Rangsan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket														
																																					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket														
																																					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket														
																																					Penyediaan Dokumen Rencana dan Penyusunan Perundangan-undangan	Terselenggaranya Rehan Rencana dan Penyusunan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Rehan Rencana dan Penyusunan Perundangan-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen														
																																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan														
																										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Hasil nilai IP ASN DLH	91,33	87,82 - 91,2	87,84 - 91,4	87,84 - 91,4	87,88 - 91,8	87,90 - 92	87,92 - 92,2	Sekretariat																									
																										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengadaan barang/jasa melalui pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup yang diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sekretariat	Penyediaan Jasa Rumi Menyurat	Terselenggarannya Jasa Rumi Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rumi Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan														
																																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan														
																																					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggara Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan														
																																					Penyediaan Bahan/Material	Terselenggara Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket														
																																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dilengkapi Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Kepala UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perlengkapan (Wajib) yang Mengampu Sub-Kegiatan
																																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dilengkapi Pajak dan Perizinannya	165 unit	182 unit	179 unit	177 unit	175 unit	173 unit	173 unit	Kepala UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perlengkapan (Wajib) yang Mengampu Sub-Kegiatan

LAMPIRAN 3
DATA KINERJA
TAHUN 2025-2029

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
									2025	2026	2027	2028	2029		
1. Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan				(Capaian kualitas lingkungan hidup + Capaian pengelolaan persampahan) dibagi 2	Persen	73,33	76,67	77,32	77,97	78,62	79,27	79,27	80,09
						Sumber data:									
						Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	persen								
						Capaian pengelolaan persampahan	persen								
			1.1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Merupakan penghitungan komposit dari 3 indikator yaitu : 1) persentase pemantauan LH dan hasil pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan (IKL)) yang diukur berdasarkan luas tutupan vegetasi hutan dan non hutan), dan 3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan HIdup	(40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan RTH + 30% Pengendalian Pencemaran LH)	Persen	62,60	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	70,12	71,06
						Sumber data:									
						1) Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	53,51	60,53	61,40	62,28	63,16	64,04	64,04	65,78
						2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Inventarisasi Tutupan Lahan	Persen	61,6646	61,6661	61,6669	61,6676	61,6684	61,6692	61,6692	61,6699
						Perhitungan nomor 2 diperoleh dari:									
						(Persentase RTH/2)+(Persentase ketercapaian IKL/2)									
						Sumber data:									
						Persentase Ketercapaian IKL	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Luas Ruang Terbuka Hijau Privat	m2	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919
						Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	m2	2.643.507	2.644.507	2.645.007	2.645.507	2.646.007	2.646.507	2.646.507	2.647.007
						Luas Kota Yogyakarta	m2	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	30,9329	31,7507	31,7514	31,7521	31,7528	31,7535	31,7535	31,7542
						Luas Tutupan Vegetasi	m2	5.083.200,53	5.083.700,53	5.084.200,53	5.084.700,53	5.085.200,53	5.085.700,53	5.085.700,53	5.086.200,53
						3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	persen	82,50%	83,34	84,17	85	85,84	86,67	86,67	87,5

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
									2025	2026	2027	2028	2029		
			1.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah	Capaian pengelolaan persampahan = persentase pengurangan sampah + persentase penanganan sampah	Persen	84,06	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	88,42	89,12
						Sumber Data :									
						Persentase sampah yang terkurangi	Persen	18,95%	19,09	19,16	19,24	19,31	19,39	19,39	19,46
						Persentase sampah yang tertangani	Persen	65,12%	66,53	67,16	67,78	68,41	69,03	69,03	69,66
			1.3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)	A (87,55-90,55)
						Sumber Data:									
						Hasil penilaian RB DLH oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DLH 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DLH 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DLH 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DLH 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)	A (87,55-90,55)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025-2030
DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1.1.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi atau arahan dokumen perencanaan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta					Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan (dokumen KLHS RPJPD + dokumen KLHS RPJMD + dokumen KLHS RTRW+ dokumen RPPLH) *dibagi* jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya	persen	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%	80,50%	81,00%	81,00%	81,00%
									Sumber data:										
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJPD	persen	87,0%	87,00%	87,00%	87,50%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJMD	persen	-	80,0%	80,0%	81,0%	82,0%	83,0%	83,0%	83,0%
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RTRW	persen	70,0%	70,0%	70,5%	71,0%	71,0%	71,5%	71,5%	71,5%
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen RPPLH	persen	-	-	80,5%	80,5%	81,0%	81,5%	81,5%	81,5%
									Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya	dokumen	2	3	4	4	4	4	4	4
					1.1.1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Ukuran yang menunjukkan persentase tahapan penetapan Perda RPPLH Kota Yogyakarta sebagai bagian perencanaan perlindungan lingkungan hidup dalam waktu 30 tahun	Jumlah tahapan penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang telah dicapai	persen	50%	75%%	100%	-	-	-	-	-
									Sumber data:										
									Jumlah seluruh tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	persen	50%	75%	100%	-	-	-	-	-
						Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Penilaian dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.	Ukuran yang menunjukkan kesesuaian arahan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dilakukan pengendalian terhadap dokumen perencanaan	Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen RPPLH	persen	-	-	-	80,50%	81,00%	81,50%	81,50%	81,50%
									Sumber data:										
									Penilaian kesesuaian Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap dokumen perencanaan pembangunan	persen	-	-	-	80,5%	81,0%	81,5%	81,5%	81,5%
					1.1.1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemantauan KLHS	Rerata penilaian pemantauan KLHS	Ukuran yang menunjukkan nilai kesesuaian dokumen KLHS yang terdiri atas KLHS RPJPD, KLHS RPJMD, dan KLHS RTRW dengan dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta	Penilaian kesesuaian dokumen KLHS dengan dokumen perencanaan pembangunan dibagi jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	persen	78,50%	79,00%	79,20%	79,80%	80,30%	80,80%	80,80%	80,8%
									Sumber data:										
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJPD	Persen	87,0%	87,0%	87,0%	88,0%	88,0%	88,0%	88,0%	88%
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJMD	Persen	-	80,0%	80,0%	81,0%	82,0%	83,0%	83,0%	83%
									Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RTRW	Persen	70,0%	70,0%	70,5%	71,0%	71,0%	71,5%	71,5%	72%
									Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3
	1.1.2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Menunjukkan kinerja pengendalian pencemaran yang didukung dari proporsi kebersihan sungai yang terpelihara, proporsi					(20%Persentase kebersihan sungai yg terpelihara + 50%Persentase pemantauan sumber pencemar + 30%Persentase Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca) x 100%	persen	82,50%	83,34%	84,17%	85,00%	85,84%	86,67%	86,67%	87,50%
									Sumber Data:										
									Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
				pemantauan sumber pencemar, dan proporsi inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)					Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	persen	65%	67%	68%	70%	72%	73%	73%	75%
									Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					1.1.2.1 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	Sumber pencemar yang dipantau berasal dari IPAL Komunal dan Drainase.	(Jumlah sumber pencemar yang diuji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dipantau) x 100%	persen	65,00%	66,67%	68,33%	70,00%	71,67%	73,33%	73,33%	75%
									Sumber Data:									
									Jumlah sumber pencemar yang diuji kualitasnya di laboratorium		39	40	41	42	43	44	45	45
									Total jumlah sumber pencemar yang dipantau		60	60	60	60	60	60	60	60
						Terpeliharanya kebersihan sungai	Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	Kebersihan sungai yang terpelihara meliputi Sungai Code, Sungai Gajah wong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal.	(Panjang sungai yang dibersihkan dibagi Total panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta) x 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Panjang sungai yang dibersihkan	meter	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
									Total panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta	meter	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
					1.1.2.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Empat Sektor Emisi GRK yang dilaporkan di aplikasi Sign-Smart meliputi Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor Limbah, dan Sektor AFOLU.	(Jumlah hasil inventarisasi emisi GRK yang dilaporkan di aplikasi Sign-Smart KLHK / Jumlah total sektor emisi GRK)*100%	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah hasil inventarisasi emisi GRK yang dilaporkan di aplikasi Sign-Smart KLHK	sektor	-	4	4	4	4	4	4	4
									Jumlah total sektor emisi GRK	sektor	-	4	4	4	4	4	4	4
		Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	Untuk mendukung validitas perhitungan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara sebagai indikator komposit dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					(Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH / Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun)*100%	persen	53,51	60,53	61,40	62,28	63,16	64,04	64,04	65,78
									Sumber Data:									
									Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH	sampel	61	69	70	71	72	73	73	75
									Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun	sampel	114	114	114	114	114	114	114	114
					1.1.2.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Sampel pemantauan kualitas air dan udara yang divalidasi KLH	Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH	sampel	61	69	70	71	72	73	73	75
									Sumber data:									
									Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH	sampel	61	69	70	71	72	73	73	75
							Persentase parameter yang di uji di laboratorium	Dokumen pengujian sampel air dan udara yang dilakukan di laboratorium	Jumlah parameter yang di uji / jumlah parameter baku mutu x 100%	persen	-	54,33	54,33	58,26	58,26	62,2	62,2	62,2
									Sumber data:									
									Jumlah parameter yang di uji	parameter	69	69	69	74	74	79	79	79
									jumlah parameter baku mutu	parameter	127	127	127	127	127	127	127	127
	1.1.3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Menunjukkan pemenuhan izin penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan					(Jumlah total izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan dibagi Jumlah total izin lingkungan dan/atau persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan) x 100%)	persen	17,85%	-	19,07%	19,65%	20,23%	20,79%	20,79%	21,33%
									Sumber Data:									
									Jumlah total izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan	dokumen	209	-	229	239	249	259	259	269
									Jumlah total izin lingkungan dan/atau persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan	dokumen	1171	-	1201	1216	1231	1246	1246	1261

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
					1.1.3.1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah dokumen izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diterbitkan	Jumlah total izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan	dokumen	209	-	229	239	249	259	259	269
									Sumber Data:									
									Jumlah total izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan	dokumen	209	-	229	239	249	259	259	269
	1.1.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Menunjukkan usaha dan/atau kegiatan yang sudah diawasi dan dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup					(Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi) * 100%	persen	32.71	33.30	33.43	33.57	33.70	33.83	33.83	33.92
									Sumber Data:									
									Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi	Usaha	328	331	334	337	340	343	343	346
									Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi	Usaha	987	994	999	1004	1009	1014	1014	1020
		Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	*Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan*	Menunjukkan usaha yang telah memiliki rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO					(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan) / (Jumlah total usaha) x 100%	Persen	78,67%	79,32%	79,80%	80,27%	80,72%	81,16%	81,16%	81,59%
									Sumber Data:									
									Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	Usaha	5358	5486	5603	5720	5837	5954	5954	6071
									Jumlah total usaha	Usaha	6811	6916	7021	7126	7231	7336	7336	7441
					1.1.4.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan (seperti: kantor, RS, hotel, toko, dan lain-lain yang berizin lingkungan) secara langsung dan/atau tidak langsung (swapantau)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dibina dan diawasi	Usaha	328	331	334	337	340	343	343	346
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		1.(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan dibagi jumlah total usaha) x 100%	Persentase	78,97%	79.32%	-	-	-	-	-	-
									Sumber data:									
									Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	Dokumen	5379	5486	-	-	-	-	-	-
									2.(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan dibagi Jumlah Total Usaha) dikali 100%	Persentase	78,67%	-	79.80%	80.27%	80.72%	81.16%	81.16%	81.59%
									Sumber data:									
									Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	dokumen	5358	-	5603	5720	5837	5954	5954	6071
									Jumlah total usaha	usaha	6811	6916	7021	7126	7231	7336	7336	7441
	1.1.5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya pengelolaan RTH	Presentase Ruang Terbuka Hijau	Indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan RTH dan kualitas lahan dengan melihat tutupan vegetasi existing					Persentase Ruang Terbuka Hijau = (Luas Ruang Terbuka Hijau Privat + Luas Ruang Terbuka Hijau Publik) / (Luas kota Yogyakarta) x 100%	%	23,33%	23,332%	23,334%	23,335%	23,337%	23,338%	23,338%	23,340%
									Sumber data:									
									Luas Ruang Terbuka Hijau Privat	m2	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919
									Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	m2	2.643.507	2.644.507	2.645.007	2.645.507	2.646.007	2.646.507	2.646.507	2.647.007

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Luas Kota Yogyakarta	m2	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50
					1.1.5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Luasan tutupan vegetasi	Luasan tumbuhan non rumput yang terlihat dari citra satelit dan dihitung progres luasannya secara periodik.	Luasan tutupan vegetasi dengan updating data deliniasi citra secara berkala.	m2	5.083.200,534	5.083.700,534	5.084.200,534	5.084.700,534	5.085.200,534	5.085.700,534	5.085.700,534	5.086.200,534
									Sumber data :									
									Luas tutupan lahan pertahun yang diupdate pada semester 2 tiap tahun	m2	5.083.200,534	5.083.700,534	5.084.200,534	5.084.700,534	5.085.200,534	5.085.700,534	5.085.700,534	5.086.200,534
						Optimalisasi pengelolaan RTH	Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH	Formulasi yang digunakan untuk melihat capaian RTHP yang dikelola DLH dari kewenangan yang dipunyai sebagai	(RTHP yang dikelola/RTHP kewenangan DLH) x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data :									
									Luas RTHP yang dikelola	m2	799.951,00	800.451,00	800.951,00	801.451,00	801.951,00	802.451,00	802.451,00	802.951,00
									Luas RTHP kewenangan DLH	m2	799.951,00	800.451,00	800.951,00	801.451,00	801.951,00	802.451,00	802.451,00	802.951,00
	1.1.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Kampung ProKlim	Kampung yang sudah melakukan upaya penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan dari					(Jumlah Kampung ProKlim/Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) x 100%	%	65,09%	65,09%	68,05%	71,01%	73,96%	76,92%	76,92%	79,88%
									Sumber data:									
									Jumlah Kampung ProKLim	kampung	105	110	115	120	125	130	130	135
									Jumlah seluruh Kampung di Kota Yogyakarta	kampung	169	169	169	169	169	169	169	169
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	Sekolah yang sudah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)					(Jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dibagi jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) x 100%	%	69,35%	76,45%	79,68%	81,29%	82,90%	84,52%	84,52%	86,13%
									Sumber data:									
									Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata	sekolah	227	237	247	252	257	262	262	267
									Jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta	sekolah	310	310	310	310	310	310	310	310
			Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	Bank sampah yang sudah beroperasi secara rutin mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya					(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah se-Kota Yogyakarta) x 100%	%	73,92%	76,54%	78,69%	80,82%	82,91%	84,98%	84,98%	87,02%
									Sumber data:									
									Jumlah bank sampah aktif (bank sampah kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Baru)	kelompok	516	535	554	573	592	611	611	630
									Jumlah bank sampah total se-Kota Yogyakarta	kelompok	694	699	704	709	714	719	719	724
					1.1.6.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga yang telah berhasil memperoleh predikat/capaian atas upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan pada tahun tersebut	Jumlah Kampung Proklim, sekolah Adiwiyata dan Berwawasan Lingkungan dan Bank Sampah Aktif	Lembaga	848	1.041	1.061	1.076	1.091	1.106	1.106	1.121
									Sumber Data :									
									Jumlah Kampung Proklim yang baru	Lembaga	105	110	115	120	125	130	130	135
									Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata yang baru ditetapkan	Lembaga	227	237	247	252	257	262	262	267
									Jumlah bank sampah (bank sampah kategori Pembina, Inovatif, Reguler, Pembinaan dan Baru)	Lembaga	516	694	699	704	709	714	714	719
1.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1.2.1 Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase sampah yang terkurangi	Indikator yang mengukur tingkat pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang					(Jumlah sampah yang terkurangi/ jumlah potensi timbulan sampah)x 100%	%	18,95%	19,09%	19,16%	19,24%	19,31%	19,39%	19,39%	19,46%
									Sumber Data :									
									Jumlah sampah yang terkurangi	ton/hari	63	57,39	57,55	57,72	57,89	58,06	58,06	58,23
									Jumlah timbulan sampah	ton/hari	332,48	300,62	300,33	300,04	299,75	299,46	299,46	299,18
		Meningkatnya penanganan sampah	Persentase sampah yang tertangani	Indikator yang mengukur tingkat penanganan sampah melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah					(Jumlah sampah yang tertangani/ jumlah potensi timbulan sampah)x 100%	%	65,12%	66,53%	67,15%	67,78%	68,40%	69,03%	69,03%	69,66%
									Sumber Data :									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Jumlah sampah yang tertangani	ton/hari	216,5	200	201,68	203,36	205,04	206,72	206,72	208,4
									Jumlah timbulan sampah	ton/hari	332,48	300,62	300,33	300,04	299,75	299,46	299,46	299,18
					1.2.1.1 Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang	Tonase pengurangan sampah	Volume sampah yang terkurangi dari kegiatan daur ulang	Jumlah sampah yang terkurangi dari kegiatan daur ulang dalam satu tahun	ton/tahun	22995	20947.35	21005.75	21067.8	21129.85	21191.9	21191.9	21253,95
									Sumber Data:									
									Jumlah sampah yang terkurangi	ton/hari	63	57,39	57,55	57,72	57,89	58,06	58,06	58,23
						Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Tonase penanganan sampah	Besarnya sampah yang tertangani dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Jumlah sampah yang tertangani dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dalam satu tahun	ton/tahun	79022,5	73000,00	73613.2	74226.4	74839.6	75452.8	75452.8	76066,00
									Sumber Data:									
									Jumlah sampah yang tertangani	ton/hari	216,5	200	201,68	203,36	205,04	206,72	206,72	208,4
1.3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	1.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (82,80)	A (82,90-85,90)	A (82,95-85,95)	A (83-86)	A (83,05-86,05)	A (83,10-86,10)	A (83,10-86,10)	A (83,15-86,15)
									Sumber Data :									
									Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (82,80)	A (82,90-85,90)	A (82,95-85,95)	A (83-86)	A (83,05-86,05)	A (83,10-86,10)	A (83,10-86,10)	A (83,15-86,15)
			Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan					Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	(4,335 - 4,50)	(4,345 - 4,50)	(4,355 - 4,50)	(4,365 - 4,50)	(4,375 - 4,50)	(4,385 - 4,50)	(4,385 - 4,50)	(4,395 - 4,50)
									Sumber Data :									
									Hasil Evaluasi SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,335 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,355 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,365 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,375 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,385 - 4,50)	Terkelola dan Terukur (4,395 - 4,50)
			Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Dinas Lingkungan					Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,47	79,57	79,67	79,77	79,87	79,97	79,97	80,07
									Sumber Data :									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,47	79,57	79,67	79,77	79,87	79,97	79,97	80,07
					1.3.1.1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibandingkan total dokumen yang harus disusun	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang wajib disusunx100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data :									
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang disusun tepat waktu	dokumen	28	28	28	28	28	28	28	28
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang wajib disusun	dokumen	28	28	28	28	28	28	28	28
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup	Persentase data sektoral yang tersedia sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan dibandingkan total jenis data yang harus disediakan	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoralx100%	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data :									
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah data statistik sektoral	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
					1.3.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria:	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.3.1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.3.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.3.1.6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Memastikan pencapaian target isik dan keuangan seimbang	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	79,17	79,27	79,37	79,47	79,57	79,67	79,67	79,77
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	79,17	79,27	79,37	79,47	79,57	79,67	79,67	79,77
					1.3.1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup		Hasil nilai IP ASN DLH	Nilai	91,00	87,82 - 91,2	87,84 - 91,4	87,86 - 91,6	87,88 - 91,8	87,90 - 92	87,90 - 92	87,92 - 92,2
									Sumber Data :									
									Hasil nilai IP ASN DLH	Nilai								
					1.3.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	Memastikan waktu dan pelaksanaan sesuai perencanaan	Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Sumber Data :									
									Jumlah belanja DLH yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	96.147.601.029,00	115.194.294.976,00	112.890.409.076	110.632.600.895	111.761.504.986	109.526.274.886	109.526.274.886	110.621.537.635
									Jumlah belanja pada DPA DLH	Rupiah	96.147.601.029,00	115.194.294.976,00	112.890.409.076	110.632.600.895	111.761.504.986	109.526.274.886	109.526.274.886	110.621.537.635

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025 - 2029

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan lima tahunan. Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan lima tahun pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Penyusunan Rencana Strategis merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Renstra ini sangat diharapkan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dra. Septi Sri Rejeki
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196809231995032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-2
1.3. Maksud Dan Tujuan 1-4
1.3.1. Maksud 1-4
1.3.2. Tujuan 1-4
1.4. Sistematika Penulisan 1-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2-1
2.1.1. Tugas dan Fungsi 2-1
2.1.2. Struktur Organisasi 2-1
2.1.3. Sumber Daya Manusia 2-2
2.1.4. Sarana dan Prasarana Kantor 2-4
2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-7
2.2. Kelompok Sasaran Layanan 2-12
2.3. Mitra Perangkat Daerah 2-17
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2-19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3-1
3.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 3-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 3-2
3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3-4
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3-7
3.5. Keselarasan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Indikator Amanah dari Pusat 3-9
3.5.1. Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan/ PJPK (Kemendukbangga/ BKKBN) 3-9
3.5.2 Dukungan terhadap Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) 3-10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4-17
4.1. Uraian Program 4-17
4.2. Uraian Kegiatan 4-4
4.3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 4-20
4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4-34
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 4-38
BAB V PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2024 2-3
Tabel 2.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024 2-4
Tabel 2.3 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dan Program PD 2-9
Tabel 2.4 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Keuangan 2-11
Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 2-20
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kerja RPJMD Kota Yogyakarta 3-1
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 3-3
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 3-5
Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra 3-8
Tabel 3.5 Indikator Bangga Kencana 3-9
Tabel 3.6 Target Indikator PPPS pada Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta 3-10
Tabel 4.1 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 4-2
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 4-5
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta 4-21
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas 4-36
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 4-39
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 4-41

DAFTAR GAMBAR

Gambar Gambar 2-1 Fasilitas Ruang Layanan yang representatif 2-12
Gambar 2-2 Fasilitas armada jemput bola 2-12
Gambar 2-3 Koordinasi internal dan eksternal 2-13
Gambar 2-4 Pencanangan komitmen pegawai Dinas Dukcapil Kota Yk 2-13
Gambar 2-5 Kelompok Lansia, Fakir Miskin, Disabilitas maupun ODGJ 2-16
Gambar 2-6 Gambar Kelompok yang berhadapan dengan hukum 2-16
Gambar 2-7 Perekaman KTP-EL di SLB N Yogyakarta dan Permohonan KIA di sekolah TK 2-16
Gambar 2-8 Daftar 20 pelaku usaha dalam pemanfaatan KIA 2-18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lebih lanjut, landasan penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, khususnya pada Pasal 15, yang mengatur bahwa perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam urusan wajib pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memegang peranan penting dalam menjamin hak-hak sipil setiap penduduk melalui pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknokratis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis data kependudukan yang akurat.

Penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif, responsif terhadap dinamika sosial dan demografi, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen

yang efektif dalam mewujudkan visi Kota Yogyakarta sebagai kota yang inklusif, berbudaya, dan berdaya saing, dengan dukungan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dindukcapil Kota Yogyakarta, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dukcapil, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51)
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra ini adalah Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 bertujuan:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan, dan
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra dengan dokumen RKPD, Renja, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1 Uraian program;

6.2 Uraian kegiatan;

6.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

6.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

6.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

6.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN : Pohon Kinerja, Cascading Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas;
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk; dan
    2. Kelompok Substansi Identitas Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan; dan
2. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Kerjasama Dan Pemanfaatan Data; dan
   2. Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

f. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Perwali no.37 tahun 2023

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024 terdapat 54 pegawai yang terdiri dari 33 orang PNS, 5 orang PPPK, 16 orang Jasa Perseorangan.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		Ada
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	• Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		Ada
	• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Ada
5	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Analis Kebijakan Ahli Muda	3 orang	
	• Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada
	• Kelompok Substansi Identitas Penduduk		Tidak Ada
	• Kelompok Substansi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Ada
	• Kelompok Substansi Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Tidak Ada
	• Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	• Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		Tidak Ada
	Pranata Komputer Ahli Muda	2 orang	Ada
6	Staf Fungsional Umum	21 orang	Ada
7	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	5 orang	Ada
8	Tenaga Jasa Perseorangan	16 orang	Ada

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2024

2.1.4. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Stationary Generating Set	4		4
2	Pompa Air	2		2
3	Station Wagon/Mobil	5		5
4	Mobil Listrik	1		1
5	Sepeda Motor	24		24
6	Mikrobus Pelayanan	1		1
7	Gerobak Dorong	2		2
8	Sepeda	1		1
9	Tool Kit Set	1		1
10	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1		1
11	Rak-Rak Penyimpan	6	1	7
12	Mesin Ketik	1		1
13	Lemari Besi/Metal	6		6
14	Lemari Kayu	6		6
15	Rak Besi	35		35
16	Rak Kayu	26	1	27
17	Rool O Pack	6		6
18	Filing Cabinet Besi	23	2	25
19	Brandkas	1		1
20	Lemari Kaca	10		10
21	CCTV	2		2
22	Media edukasi	2		2
23	White Board	5		5
24	LCD Projector	3		3
25	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		1
26	Papan Nama Instansi	1		1
27	Switcher HDMI	1		1
28	Alat Penghancur/Pemusnah Dokumen	1		1
29	Meja Knap	15		15
30	Kursi Plastik	19	1	20
31	Meja Lipat	3		3
32	Sice	2		2
33	Meja Rapat	3		3
34	Meja Tambahan	1		1
35	Meja 1/2 Biro	46	3	49
36	Kursi Rapat	24	1	25
37	Kursi Tamu	2		2

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
38	Kursi Putar	32	3	35
39	Bangku Tunggu	1		1
40	Kursi Lipat	39	2	41
41	Meja Komputer	7		7
42	Rak Sepatu (Almunium)	1		1
43	Sofa	15		15
44	Kredensa	2		2
45	Almari Kabinet	3		3
46	Jam Dinding	5		5
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	1	4
48	Air Purifier	2		2
49	Dehumidifire	1		1
50	Lemari Es	2		2
51	AC	22		22
52	Kipas Angin	2	7	9
53	Exhause Fan	5	1	6
54	Tempat Koran	1		1
55	Tempat Sampah	2	1	3
56	Televisi	6		6
57	Sound System	8		8
58	Compact Disc	1		1
59	Megaphone	2		2
60	Microphone	5		5
61	Stabilisator	3		3
62	Lambang Garuda Pancasila	1		1
63	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2		2
64	Tiang Bendera	1		1
65	Tangga Aluminium	3		3
66	Dispenser	3		3
67	Handy Cam	1		1
68	Gordyin/Kray	2		2
69	Alat Pemadam/Tabung Apar	5		5
70	Meja kerja 1 Biro	2		2
71	Kursi Sandaran Tinggi	4		4
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13		13
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	2	11
74	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1		1
75	Microphone/Wireless MIC	1		1
76	Power Supply	3		3
77	Tripod Camera	12		12
78	Lighting Stand Tripod	2		2
79	Camera Digital	11	1	12

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
80	Audio Converter	1		1
81	Clipp On	3		3
82	Pesawat Telephone	5	4	9
83	Telephone Mobile	5		5
84	Handy Talky (HT)	1		1
85	Facsimile	1		1
86	Thermogun	3		3
87	Thermometer	2		2
88	Kursi roda	1		1
89	Thermohygrometer	2		2
90	Alat Permainan Anak	7	3	10
91	P.C Unit	56	10	66
92	Kios PC	3		3
93	Monitor	13		13
94	PC AIO	12		12
95	Card Reader	1		1
96	Laptop	23	1	24
97	Tablet PC	5		5
98	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	2		2
99	Monitor	7		7
100	Printer Dotmatrik	4		4
101	Printer E-KTP	14		14
102	Printer KIA	9		9
103	Printer	58	1	59
104	Access Point	1		1
105	Wifi Card	1		1
106	Switch Hub TP Link 24 Port	4		4
107	Wireless Indoor	2		2
108	Omni Antena 2,4 GHZ	2		2
109	Fingerprint Scanner	17		17
110	Iris Scanner	18		18
111	Scanner	18		18
112	Signature Pad	13		13
113	Barcode scanner	5		5
114	Hardisk Eksternal	5		5
115	Webcam	14		14
116	Server	6	1	7
117	Router	3		3
118	Modem	6		6
119	Wireless Router	17		17
120	Smartcard Reader	33		33
121	Tang Criping	2		2
122	UPS	6		6

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
123	Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)	5		5
124	Enclosure KiosK	2		2
125	Tenda Tunggu	2		2
126	Matras	1		1
127	Camera Adaptor		5	5

Sumber: Buku Inventaris Barang, 2024

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
   - Counter Layanan
   - Nomor Antrian Elektronik
   - Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
   - Ruang Laktasi
   - Kids Zone (Ruang bermain Anak)
   - Fasilitas Difabel
   - Fasilitas Informasi dan Pengaduan
   - Fasilitas Ruang Rapat
   - Ruang Kearsipan
   - Pelayanan Keliling

2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami perubahan indikator kinerja utama, yaitu pada Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026, serta perubahan indikator kinerja program pada kedua masa Renstra tersebut. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

selama 5 tahun terakhir dalam rentang pertengahan Renstra 2017-2022 dan RenStra 2023-2026 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dan Program PD

	Indikator Sasaran PD	Indikator Program PD	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan		98	99,88	99,9	91,58	95,8	99,77	99,94	99,92	92,9	96,63
2	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat		-	-	-	A Nilai	A Nilai	-	-	-	AA Nilai (90,91)	AA Nilai (9,548)
3		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	-	-	-	87,5	91,83	-	-	-	91,82	93,37
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75	99,75	99,8	-	-	99,54	99,85	99,84	-	-
4		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100	100	100	97,25	99,77	100	100	100	99,88	99,89
5		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-		A Nila (86,6)	A Nilai (88,33)	-	-		A Nilai (88)	A Nilai (88,54)

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta

Sedangkan target dan realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2020- 2024 mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah tertuang pada matriks berikut.

Tabel 2.4 Matrik Kinerja Berdasarkan Capaian Keuangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)					CAPAIAN KEUANGAN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Pegawai	2.484.940.000					2.350.133.561					94,58%				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.885.500					809.588.232					99,23%				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.110.000					137.935.724					99,87%				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.356.000					13.356.000					100,00%				
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.120.957.000					1.099.944.760					98,13%				
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	307.081.000					305.302.900					99,42%				
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	221.497.000					218.404.440					98,60%				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.171.183.416	7.083.212.569	7.155.106.275	6.869.934.350		6.603.201.404	6.265.161.956	6.731.671.929	6.489.396.426		92,08%	88,45%	94,08%	94,46%
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		978.905.562	1.191.762.128	1.289.807.500	1.341.393.250		943.990.688	1.165.986.596	1.269.743.500	1.321.910.770		96,43%	97,84%	98,44%	98,55%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		349.675.180	547.111.450	631.665.000	650.754.000		347.750.288	538.407.084	620.367.000	649.499.000		99,45%	98,41%	98,21%	99,81%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		575.533.360	797.185.320	862.340.200	1.055.297.400		568.106.146	773.956.670	861.668.550	1.051.377.651		98,71%	97,09%	99,92%	99,63%
	TOTAL	**5.101.826.500**	**9.075.297.518**	**9.619.271.467**	**9.938.918.975**	**9.917.379.000**	**4.934.665.617**	**8.463.048.526**	**8.743.512.306**	**9.483.450.979**	**9.512.183.847**	**96,72%**	**93,25%**	**90,90%**	**95,42%**	**95,91%**

Sumber: SPJ Fungsional, Dindukcapil Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 2.3 di atas terlihat pencapaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini karena telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

1. Adanya perbaikan dalam sarana prasarana pelayanan dengan ruang layanan yang representatif;

Gambar Gambar 2-1 Fasilitas Ruang Layanan yang representatif

2. Adanya penambahan armada jemput bola berupa mobil listrik dan seperangkat alat perekaman KTP-El khususnya untuk lokasi yang susah diakses karena jalan yang sempit;

Gambar 2-2 Fasilitas armada jemput bola

3. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan baik;

Gambar 2-3 Koordinasi internal dan eksternal

4. adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;

Gambar 2-4 Pencanangan komitmen pegawai Dinas Dukcapil Kota Yk

5. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
6. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil;
7. Adanya perwal pelimpahan kewenangan di kemantren sudah berjalan;
8. Tersedianya mesin ADM di 8 titik lokasi yg memudahkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri (Mall Pelayanan Publik, UPT Pasty, UPT Taman Budaya, Dinas Dukcapil, Kemantren Mergangsan, Kemantren Jetis, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Danurejan);
9. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :

1) Layanan Pungkasi (Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun) yaitu layanan terintegrasi peningkatan efektivitas pemberian dokumen administrasi kependudukan pasca perceraian, yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama.
2) Layanan Mantul Tenan (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas dalam Satu Layanan) yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh Petugas setelah permohonan melaksanakan pernikahan di Gereja.
3) Layanan Kado Ananda yaitu layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit
4) Layanan 3 in 1 Kematian (SURAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman
5) Layanan Mantap (Manten Anyar Tercatat Dapat Empat) yaitu layanan buku nikah, KK dan KTP El menjadi satu paket langsung diberikan oleh Petugas setelah permohonan melaksanakan pernikahan di KUA
6) Layanan Pakdul Pindat, yaitu paket dokumen lengkap untuk pelayanan pindah datang berupa KK, KTP dan KIA
7) Up date Data Perkawinan melalui WA dan JSS
8) Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola rekam KTP-El yaitu Yaitu layanan jemput bola rekam KTP el sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah, LAPAS, Panti-Panti, Sekolah Luar Biasa, lembaga pemasyarakatan yang terkena kasus hukum, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit, serta warga ODGJ keterbatasan mental.
9) Melaksanakan layanan drive thru yaitu layanan cetak KTP El karena hilang atau rusak, dimana pemohon tanpa turun dari kendaraan dilayani dengan cepat +- 5 menit.

Dalam pelayanan daring, seluruh dokumen kependudukan (KK, Akta-akta catatan sipil, surat pindah penduduk) disampaikan ke pemohon dalam bentuk file dokumen melalui e-mail. Adapun untuk KIA disampaikan ke pemohon melalui jasa pos oleh Mall Pelayanan Publik atau diambil langsung di Mall Pelayanan Publik.

2.2. Kelompok Sasaran Layanan

Layanan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogykarta menyasar untuk semua kelompok golongan, dari kecil, muda sampai orang tua tanpa membedakan apapun itu karena layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dasar dari

pelayanan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Akan tetapi untuk lebih meningkatkan layanan dengan menyasar kepemilikan dokumen kependudukan kepada 5 kelompok rentan diantaranya sasaran anak (Panti Asuhan, penghayat kepercayaan, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak berhadapan hukum dan anak luar kawin). Demikian juga menyasar pada warga dengan keterbatasaan seperti kaum difabel, lansia, maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Gambar 3 26 Informasi bagi warga dengan keterbatasan

Melalui pengecekan data kepemilikan dengan menyasar penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan melakukan penerbitan maupun penyerahan dokumen kependudukan, maka pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan bagi situasi khusus/ kelompok rentan ini. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan jemput bola terhadap kelompok rentan.

Gambar 2-5 Kelompok Lansia, Fakir Miskin, Disabilitas maupun ODGJ

Gambar 2-6 Gambar Kelompok yang berhadapan dengan hukum

Gambar 2-7 Perekaman KTP-EL di SLB N Yogyakarta dan Permohonan KIA di sekolah TK

2.3. Mitra Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam pemanfaatan data kependudukan. Dinas Kependudukan melaksanakan bermitra dengan berbagai stakeholder baik masyarakat, media massa maupun lembaga atau instansi pemerintah dan non pemerintah. Kemitraan ini merupakan upaya pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Dalam Hal Pemanfaatan Data Kependudukan pada saat ini data kependudukan digunakan dalam berbagai bidang pembangunan

Data Penduduk digunakan sebagai data pembanding dan atau verifikasi data yang yang dimiliki OPD pengguna dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan data yang akan dipakai dalam berbagai program seperti :

1. Program penanggulangan kemiskinan seperti, Bantuan sosial, Bantuan Perumahan,
2. Program Kesehatan seperti Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
3. Verifikasi Pendaftaran Siswa Baru
4. Verifikasi data Kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Dalam hal pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkolaborasi dengan berbagai lembaga Instansi antara lain:

1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pelayanan dokumen adminduk seperti akta kelahiran khususnya bagi anak-anak yang bermasalah status sosial dan kependudukannya
2) Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA) dalam pelayanan perkawinan Campuran, HAKAN (Harapan Keluarga Antar Negara)
3) Organisasi Yayasan Kebaya Yayasan Kebaya yaitu Yayasan Nir Laba yang bergerak di isu HIV / AIDS, dukungan perawatan ODHIV dalam shelter dan ODHIV luar shelter, Advokasi dan Pemberdayaan Transpuan di Yogyakarta. Dalam hal ini berkolaborasi dengan DInas Kependudukan dan pencatatan SIpil Kota Yogyakarta dalam pelayanan kepemilikan dokumen adminduk bagi kelompok transgender
4) Pengadilan Negeri dalam pelayanan pencatatan sipil yang bermasalah dan memerlukan penetapan pengadilan

5) Pengadilan Agama dalam layanan perubahan status perkawinan melalui inovasi Pungkasi (Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun)
6) Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam pelayanan dokumen kependudukan anak baik KIA, KTP El maupun akta kelahiran khususnya untuk anak-anak yang bermasalah hukum. Hal ini juga dalam rangka pelaksanaan program RANHAM kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia.
7) Rumah Sakit (RS) di Kota Yogyakarta dalam pelayanan akta kelahiran dan akta kematian secara terintegrasi dengan dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, KIA, KTP El. Terdapat 20 RS di Kota Yogyakarta maupun Luar Kota Yogyakarta yang telah bekerjasama
8) Lembaga Agama seperti KUA dan gereja dalam pelayanan akta perkawinan pada inovasi Mantul dan Mantap
9) Mass Media dalam berbagai publikasi inovasi dan kebijakan administrasi kependudukan
10) Kemantren, kelurahan dan Mall Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk yang semakin dekat dan mudah
11) Kerjasama dengan 20 (dua puluh) pelaku usaha swasta dalam pemanfaatan KIA

Gambar 2-8 Daftar 20 pelaku usaha dalam pemanfaatan KIA

Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam Pemanfaatan data. Pada tahun 2024 terdapat penambahan PKS sebanyak 8 OPD sehingga sampai dengan tahun 2024 terdapat 28 OPD/unit kerja yang melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 28 OPD tersebut yaitu:

1) Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

4) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
7) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
8) Dinas Perdagangan
9) RSUD
10) Dinas Kesehatan
11) Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
12) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14) Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15) Empat belas Kemantren (Jetis, Tegalrejo, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Gondokusuman, Gedongtengen, Wirobrajan, Mergangsan, Pakualaman, Ngampilan, Mantrijeron, Kotagede, dan Kemantren Umbulharjo)

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Namun demikian, masih didapati kendala maupun permasalahan-permasalahan, sehingga muncul isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	- Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil karena akses informasi tentang adminduk kurang merata (tingkat literasi digital yang beragam) - Permasalahan pencatatan sipil, seperti belum adanya akta kelahiran, kematian, dan perkawinan - Tingkat kesadaran masyarakat untuk update data masih rendah - Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen oleh masyarakat dan lembaga pengguna	- Dalam Isu Strategis Transformasi Sosial: Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan - Isu Strategis Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Keamanan dan Privasi Data - Akses dan Ketepatan Data dalam mendukung pembangunan global dan nasional	- Digitalisasi dan Optimalisasi Data Kependudukan - Peningkatan Kualitas Layanan Publik - Penanganan Kelompok Rentan dan Khusus	- Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya dokumen adminduk - Gangguan teknis Aplikasi SIAK - Peningkatan Kapasitas SDM	- Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan - optimalisasi data kependudukan berbasis digital - Peningkatan pelayanan Adminduk yang Prima berbasis On Line bebas Biaya dan Bebas Korupsi - Pengelolaan Informasi dan Keamanan SIAK - Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait - Edukasi dan Kesadaran Masyarakat yang masih perlu ditingkatkan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	7. Adanya kebijakan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat					

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2029 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kerja RPJMD Kota Yogyakarta

VISI DAERAH	MISI DAERAH	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH
Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan	1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
			2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari	2. Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
	3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
			5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
			6. Menurunnya kemiskinan masyarakat

VISI DAERAH	MISI DAERAH	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH
	4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945	4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan
	5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY		8. Meningkatnya kondusivitas daerah

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Dari kelima misi Walikota Yogyakarta tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung misi ke-4, untuk mendukung tujuan ke-4 dan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-5 (Warna yang diblok hijau dalam tabel adalah dukungan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran serta isu strategis yang terpetakan serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
- Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima		Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	84,97	85,79	88,68	89,53	90,39	91,24	91,56	
		Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Indeks tertib administrasi kependudukan	79,78	81,09	86,36	87,57	88,77	89,98	90,12	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Nilai)	AA (91,548)	AA (91,548 - 94,548)	AA (91,553 - 94,553)	AA (91,558 - 94,558)	AA (91,563 - 94,563)	AA (91,568 - 94,568)	AA (91,573 - 94,573)	

Sumber: SIPD RI, Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima dan sasaran perangkat daerah Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, dan Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Cakupan Layanan Dokumen Adminduk dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan melaksanakan Langkah – Langkah :

1) Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial yaitu dalam bentuk pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan dokumen pencatatan sipil, dan pemanfataan data kependudukan.
2) Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
3) Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.
4) Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip *good governance*, dengan cara mengerjakan proses kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi adminitrasi kependudukan secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.

Melalui strategi di atas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, disusunlah penahapan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
1	Penguatan kapasitas petugas pelayanan operator SIAK Peningkatan cakupan kepemilikan dan kualitas pelayanan Adminduk yang prima berbasis daring, bebas biaya dan bebas korupsi	1	Penguatan kapasitas petugas pelayanan operator SIAK	1	Penguatan kapasitas petugas pelayanan operator SIAK	1	Penguatan kapasitas petugas pelayanan operator SIAK	1	Penguatan kapasitas petugas pelayanan operator SIAK
2	Penyiapan sarpras layanan online & offline	2	Penyiapan sarpras layanan online & offline	2	Penyiapan sarpras layanan online & offline	2	Penyiapan sarpras layanan online & offline	2	Penyiapan sarpras layanan online & offline
3	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
4	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen register dan arsip	4	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen register dan arsip	4	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen register dan arsip	4	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen register dan arsip	4	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen register dan arsip
5	Koordinasi tim internal	5	Penyusunan dasar hukum melalui perwal/kepwal	5	Implementasi perwal/kepwal	5	Implementasi perwal/kepwal	5	Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perwal/kepwal
6	Pengembangan inovasi yang telah ada	6	Pengembangan inovasi yang telah ada	6	Pengembangan inovasi yang telah ada	6	Pengembangan inovasi yang telah ada	6	Pengembangan inovasi yang telah ada
7	Membangun inovasi layanan baru	7	Membangun inovasi layanan baru	7	Membangun inovasi layanan baru	7	Membangun inovasi layanan baru	7	Membangun inovasi layanan baru

Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
1	Penyusunan Perwal/Kepwal dalam Pembangunan sistem pelayanan online	1	Pemeliharaan aplikasi	1	Pemeliharaan aplikasi	1	Pemeliharaan aplikasi	1	Pemeliharaan aplikasi
2	Perencanaan, analisis, desain pengembangan aplikasi	2	Perbaikan dan Pengembangan aplikasi	2	Perbaikan dan Pengembangan aplikasi	2	Perbaikan dan Pengembangan aplikasi	2	Perbaikan dan Pengembangan aplikasi
3	Implementasi pengembangan aplikasi	3	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	3	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	3	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	3	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi
4	Pelaksanaan uji coba aplikasi	4	Monitoring dan Evaluasi	4	Monitoring dan Evaluasi	4	Monitoring dan Evaluasi	4	Monitoring dan Evaluasi
5	Penyusunan SOP dan petunjuk operasional								
6	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi								
1	Pengadaan sarana hasil temuan audit internal Implementasi SMKI : Smoke Detector	1	Pengadaan sarana hasil temuan audit internal : Penambahan Hardisk CCTV	1	Pengadaan sarana hasil temuan audit internal : CCTV Ruangan Per Bidang	1	Pengadaan sarana hasil temuan audit internal : Perangkat Otomatis Genset & Kelengkapannya	1	Pengadaan sarana hasil temuan audit internal : UPS PC Layanan
2	Peningkatan kapasitas SDM/Operator SIAK terkait SMKI	2	Peningkatan kapasitas SDM/Operator SIAK terkait SMKI	2	Peningkatan kapasitas SDM/Operator SIAK terkait SMKI	2	Peningkatan kapasitas SDM/Operator SIAK terkait SMKI	2	Peningkatan kapasitas SDM/Operator SIAK terkait SMKI
3	Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat terkait SMKI	3	Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat terkait SMKI	3	Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat terkait SMKI	3	Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat terkait SMKI	3	Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat terkait SMKI
4	Pengelolaan SOP SMKI	4	Pengelolaan SOP SMKI	4	Pengelolaan SOP SMKI	4	Pengelolaan SOP SMKI	4	Pengelolaan SOP SMKI
1	Perpanjangan kerjasama dengan mitra layanan	1	Membangun kerjasama dengan mitra baru	1	Peningkatan kapasitas pelaksana	1	Peningkatan kapasitas pelaksana	1	Peningkatan kapasitas pelaksana
2	Menyiapkan sarpras pendukung kerjasama layanan	2	Peningkatan kapasitas pelaksana	2	Monev	2	Monev	2	Monev
3	Peningkatan kapasitas pelaksana	3	Monev						

Pada tabel 3.3 di atas untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta guna kelancaran dalam Layanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta dalam updating system, pengelolaan aplikasi dan pemeliharaan sistem informasi. Tahapan tersebut dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran, target dan lokus yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban", yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan strategi serta arah kebijakan yang dipilih sebagai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
1	2	3	4	5
1	Tujuan: Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima			
2	Sasaran 1: Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan Regulasi nasional: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentrang tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan, melalui: a. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan b. Meningkatkan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil c. Meningkatkan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan d. Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	1. Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan 2. Meningkatnya cakupan layanan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil 3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan 4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	
3	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, melalui:	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Dukcapil	

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

3.5. Keselarasan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Indikator Amanah dari Pusat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga ikut mendukung beberapa indikator amanat dari pusat seperti:

3.5.1. Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan/ PJPK (Kemendukbangga/ BKKBN)

Dalam rangka menghadapi dan menyelesaikan isu kependudukan seperti bonus demografi, stunting dan juga aging population serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan berkesinambungan. Untuk dapat mengimplementasikan GDPK ke dalam perencanaan pembangunan di daerah, maka perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini disusun setiap 5 tahun sekali sebagai living document dengan di dalamnya termasuk rencana aksi. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Aksi perlu diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah agar arah pembangunan kependudukan di daerah selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan tujuan, indikator, dan capaian antara pemerintah pusat dan daerah. Tabel 3.5 berikut adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.5 Indikator Bangga Kencana

No	Indikator	Data Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99
2	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	92,42	92,52	92,62	92,72	92,82	92,92
3	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	87,94	88,65	88,66	88,67	88,68	88,69
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

Rencana aksi untuk mencapai indikator cakupan kepemilikan Akta Kelahiran balita adalah dengan jemput bola akta kelahiran, koordinasi dengan vaskes bersalin, koordinasi dengan lembaga organisasi yang menangani anak terlantar. Rencana aksi untuk mencapai cakupan indikator kepemilikan Akta Cerai adalah dengan jemput bola akta perceraian, kerjasama dengan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Dan Rencana aksi untuk mencapai cakupan indikator kepemilikan Akta Nikah adalah dengan jemput bola akta perkawinan, update data

perkawinan, sedangkan Rencana aksi untuk mencapai cakupan indikator kepemilikan Akta Kematian adalah dengan optimalisasi fungsi RT di wilayah, koordinasi dengan petugas makam di wilayah.

Berdasarkan data indikator Bangga Kencana di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan PJPK dalam mencapai target pembangunan keluarga berkualitas.

3.5.2. Dukungan terhadap Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

Berdasarkan surat dari Kemendagri RI nomor 400.5.7/1685/Bangda hal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), diperlukan kinerja interveni dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing – masing sasaran dengan indikator layanan seperti indikator layanan Rumah Tangga Mayarakat, dimana dukungan layanan yang diamanatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam PPPS yaitu Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu ldentitas Anak (KlA). Dukungan layanan tersebut didekati dengan 2 indikator yang juga menjadi Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6 Target Indikator PPPS pada Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta

No.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase (%)	87,23	88,22	89,23	90,23	91,23	92,23	93,22
2	Kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 4 thn	Persentase (%)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	99,99

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

3.6. Crosscutting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan/aspek crosscutting sebagai berikut:

3.6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda mendukung dan mengkoordinasikan

berbagai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam hal perencanaan dan pembangunan daerah.

a. Perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra):
   Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun Renstra yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipul Kota Yogyakarta. Dalam hal merumuskan program dan kegiatan dalam Renstra Dndukcapil.

b. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)

   Bappeda akan mengkoordinasikan penyusunan Renja yang merupakan rencana kerja tahunan Dindukcapil. Dalam hal ini berkoordinasi untuk menyusun program dan anggaran yang terkait dengan upaya peningkatan cakupan layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

c. Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan:
   Bappeda memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target dan efektivitas kinerja dan penggunaan anggaran.

d. Pembinaan dan Bimbingan Teknis

   Bappeda dapat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terkait dengan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

3.6.2 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terkait dengan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset yang efektif dan efisien.

a. Penyusunan Rencana Anggaran:

   Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) membantu dalam penyusunan rencana anggaran tahunan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas Pembangunan serta ketersediaan sumber daya keuangan yang ada.

b. Penataussahaan Keuangan:

   BPKAD bertanggung jawab untuk memantau penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk pencairan dana, pelaporan atas pengeluaran yang telah dilakukan.

c. Pelaporan Keuangan:

BPKAD) melakukan pemantauan dan pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Pengelolaan Aset Daerah:

BPKAD) membantu dalam manajemen aset daerah yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset secara efisien.

e. Pengawasan dan Audit Keuangan:

BPKAD) melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta efektivitas penggunaan anggaran.

3.6.3 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memiliki SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

a. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bertanggung jawab untuk melakukan proses rekruitmen dan seleksi Calon Aparatur ipil Negara (ASN) di di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk pengumuman lowongan, penyusunan tes seleksi, dan pelaksanaan tes kompetensi.

b. Pengembangan SDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat memberikan dukungan dalam pengembangan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pegawai, baik yang bersifat teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

c. BKPSDM melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan pegawai untuk meningkatkan

kinerja dan pelayanan.

3.6.4 Sekretariat Daerah

Dukungan kegiatan Sekretariat Daerah yaitu dalam Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan. Sekda memiliki 8 bagian yang masing – masing memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diantaranya:

a. Bagian Hukum

   Bagian Hukum memantau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa/ permasalahan hukum yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan masukan terkait dengan implikasi hukum dari peraturan tersebut.

b. Bagian Organisasi

   Bagian Organisasi membantu dalam Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama

   Bagian Perekonomian dan Kerja Sama mendukung kegiatan dalam pelaksanaan Kerjasama pelayanan Adminduk dengan instansi yang akan melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

d. Bagian Pengadaan Barang Jasa

   Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia barang/jasa selama kontrak berlangsung, untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga dan memenuhi standar yang ditetapkan.

e. Bagian Tata Pemerintahan

   Bagian tata pemerintahan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan menyusun program kerja yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.

f. Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mendukung kelancaran operasional Dindukcapil melalui pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan urusan keprotokolan serta kehumasan. Peran ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan aset, pengaturan persuratan, serta fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan dan publikasi untuk mendukung kinerja Dindukcapil.

g. Bagian Administrai Pembangunan

Bagian ini berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menyatukan data kependudukan dan informasi pembangunan. Hasil koordinasi kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait pembangunan daerah.

3.6.5 Inspektorat

Inspektorat memiliki peran penting dalam Pengawasan dan Consulting (Dukungan Koordinasi, Pendampingan dan Pembinaan Administrasi terkait SPIP, LKIP, RB). Insspektorat mengawasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil, diantaranya:

a. Audit Kinerja

Inspektorat dapat melakukan audit terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan Keuangan

Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keakuratan, kecukupan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Pembinaan dan Bimbingan

Inspektorat juga dapat memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang baik.

d. Penanganan Pengaduan dan Pelaporan

Inspektorat bertanggung jawab dalam menangani pengaduan dan pelaporan terkait dengan potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya yang

terjadi di Dinas.

3.6.6 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persadian

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfosan) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dukcapil.

a. Pengembangan Sistem Informasi

Dinkominfosan membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Ssipil dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan pengelolaan informasi terkait layanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil.

b. Penguatan Infrastruktur TIK

Diskominfosan bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur TIK di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk jaringan komunikasi dan koneksi internet yang handal, sehingga mendukung operasional dan konektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

c. Pengamanan dan Perlindungan Data

Diskominfosan bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan data dan informasi termasuk data lainnya yang sensitif dan bersifat rahasia yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai SOP SMKI.

d. Pengembangan Aplikasi

Diskominfosan membantu dalam pengembangan aplikasi dan solusi teknologi yang inovatif untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.6.7 Dinas Perpustakaan dan Kerasipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Pengelolaan Kerasipan.

3.6.8 OPD atau Lembaga Teknis Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti:

a. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta melalui sekolah, baik di Tingkat TK/ SD, SLTP, maupun Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY di Tingkat SLTA mendukung dakam pelaksanaan kegiatan jemput bola dalam perekaman KTP-El maupun penerbitan KIA bagi anak penduduk Kota Yogyakarta.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan dukungan kegiatan dalam Fasilitas sarpras tempat pelayanan rekam dan cetak KTP dan KIA, dan inovasi MANTAP.

c. Dinsosnakertrans berperan dalam memfasilitasi atau mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Disdukcapil, terutama kelompok yang membutuhkan pendampingan (kelompok rentan termasuk lansia, disabilitas dan orang terlantar) agar terdaftar dalam administrasi kependudukan.

d. Instansi vertikal (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri) yang terintegrasi dalam inovasi layanan Pungkasi, Lembaga Pemasyarakatan Anak, rumah sakit, Lembaga agama (seperti gereja, pura, KUA) yang terintegrasi dalam inovasi layanan MANTUL dan MANTAP, rumah sakit yang sudah PKS, sampai tingkat RT/RW yang berperan dalam memewujudkan tertib adminduk sehingga membantu ketercapaian target pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Pada bab IV ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 - 2029 telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah. Dari hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

Tabel 4.1 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.369.773.000,00		8.540.008.636,00		8.756.769.945,00		8.994.828.383,00		9.304.568.893,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.138.921.500,00		6.263.783.095,00		6.422.769.564,00		6.597.376.697,00		6.824.560.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Predikat)	A	A	A	6.138.921.500,00	A	6.263.783.095,00	A	6.422.769.564,00	A	6.597.376.697,00	A	6.824.560.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai SPIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Predikat)	Optimum	Optimum	Optimum		Optimum		Optimum		Optimum		Optimum		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai IKM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	90.17	90.50	91.00		91.50		92.00		92.50		93.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.012.649.000,00		1.033.245.610,00		1.059.471.306,00		1.088.273.716,00		1.125.748.857,00	
Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	81.99	82.28	82.62	1.012.649.000,00	82.96	1.033.245.610,00	83.30	1.059.471.306,00	83.65	1.088.273.716,00	83.99	1.125.748.857,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					515.683.000,00		526.171.650,00		539.526.866,00		554.194.252,00		573.278.152,00	
Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)	95.09	95.29	95.31	515.683.000,00	95.34	526.171.650,00	95.37	539.526.866,00	95.40	554.194.252,00	95.43	573.278.152,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					702.519.500,00		716.808.281,00		735.002.209,00		754.983.718,00		780.981.884,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Rerata Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persentase)	53	56	76	702.519.500,00	80	716.808.281,00	84	735.002.209,00	88	754.983.718,00	88	780.981.884,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					8.369.773.000,00		8.540.008.636,00		8.756.769.945,00		8.994.828.383,00		9.304.568.893,00	

Sumber: SIPD RI, 2025

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 - 2029 merencanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan serta 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut Tabel 4.2 Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima				Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan		
		Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan			Indeks tertib administrasi kependudukan		
			Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Pendafatraan Penduduk	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pencatatan sipil	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi pencatatan sipil	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan		Rerata Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Tersajinya Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan	Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Peserta Hadir dalam Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi	Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan SOP SMKI			
					Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai IKM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,12,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah ASN yang dikelola gaji dan tunjangannya	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah akuntansi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlaksana	2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	2,12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola	2,12.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah laporan keuangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	2,12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	2,12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2,12.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2,12.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2,12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2025

4.3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Secara rinci berikut tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.369.773.000		8.369.773.000		8.540.008.636		8.756.769.945		8.994.828.383		9.304.568.893		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				#VALUE!		6.138.921.500		6.263.783.095		6.422.769.564		6.597.376.697		6.824.560.000		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	90,17	90,5		91	6.138.921.500	91,5	6.263.783.095	92	6.422.769.564	92,5	6.597.376.697	93	6.824.560.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Nilai SPIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Predikat)	Optimum (4,584)	Optimum (4,585-4,70)		Optimum (4,586-4,70)		Optimum (4,587-4,70)		Optimum (4,588-4,70)		Optimum (4,589-4,70)		Optimum (4,590-4,70)			
	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Predikat)	A (88,54)	A (88,60 - 90)		A (88,70 - 90)		A (88,8 - 90)		A (88,90 - 90)		A (89,00 - 90)		A (89,10 - 90)			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	16,648,000	100%	11.175.000	100%	11.405.240	100%	11.685.064	100%	11.992.197	100%	12.379.500		
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.780.000		2.520.000		2.571.000		2.636.500		2.708.000		2.801.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3.780.000	4	2.520.000	4	2.571.000	4	2.636.500	4	2.708.000	4	2.801.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				620.000		320.000		330.000		340.000		350.000		360.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	620.000	1	320.000	1	330.000	1	340.000	1	350.000	1	360.000		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				620.000		320.000		330.000		340.000		350.000		360.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	620.000	1	320.000	1	330.000	1	340.000	1	350.000	1	360.000		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				620.000		320.000		330.000		340.000		350.000		360.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	620.000	1	320.000	1	330.000	1	340.000	1	350.000	1	360.000		
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				620.000		320.000		330.000		340.000		350.000		360.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	620.000	1	320.000	1	330.000	1	340.000	1	350.000	1	360.000		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.305.000		5.965.000		6.086.000		6.240.000		6.410.000		6.631.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	9.305.000	1	5.965.000	1	6.086.000	1	6.240.000	1	6.410.000	1	6.631.000		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.083.000		750.000		765.000		785.000		806.000		833.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.083.000	1	750.000	1	765.000	1	785.000	1	806.000	1	833.000		
2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		660.000		663.240		663.564		668.197		674.500		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	0	1	660.000	1	663.240	1	663.564	1	668.197	1	674.500		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.812.277.000		5.119.351.000		5.223.474.000		5.356.048.000		5.501.679.000		5.691.155.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5.812.277.000	5	5.119.351.000	5	5.223.474.000	5	5.356.048.000	5	5.501.679.000	5	5.691.155.000		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.809.752.000		5.117.666.000		5.221.759.000		5.354.287.000		5.499.870.000		5.689.286.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	5.809.752.000	39	5.117.666.000	39	5.221.759.000	39	5.354.287.000	39	5.499.870.000	39	5.689.286.000		
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				465.000		285.000		290.000		298.000		306.000		316.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	465.000	3	285.000	3	290.000	3	298.000	3	306.000	3	316.000		
2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				405.000		405.000		413.000		423.000		435.000		450.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	5	405.000	5	405.000	5	413.000	5	423.000	5	435.000	5	450.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				575.000		275.000		280.000		287.000		295.000		305.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	575.000	1	275.000	1	280.000	1	287.000	1	295.000	1	305.000		
2.12.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				375.000		195.000		198.000		204.000		209.000		216.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	375.000	1	195.000	1	198.000	1	204.000	1	209.000	1	216.000		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				330.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	330.000	12	330.000	12	336.000	12	345.000	12	354.000	12	366.000		
2.12.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				375.000		195.000		198.000		204.000		210.000		216.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	375.000	1	195.000	1	198.000	1	204.000	1	210.000	1	216.000		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.074.000		2.010.000		2.048.695		2.102.000		2.157.000		2.233.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	3.074.000	5	2.010.000	5	2.048.695	5	2.102.000	5	2.157.000	5	2.233.000		
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				740.000		500.000		510.000		523.000		537.000		556.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	740.000	1	500.000	1	510.000	1	523.000	1	537.000	1	556.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				500.000		280.000		285.000		293.000		300.000		311.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	280.000	1	285.000	1	293.000	1	300.000	1	311.000		
2.12.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				520.000		280.000		285.695		293.000		300.000		311.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	520.000	1	280.000	1	285.695	1	293.000	1	300.000	1	311.000		
2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				354.000		360.000		367.000		376.000		387.000		400.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	354.000	1	360.000	1	367.000	1	376.000	1	387.000	1	400.000		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				460.000		310.000		316.000		324.000		333.000		344.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	460.000	1	310.000	1	316.000	1	324.000	1	333.000	1	344.000		
2.12.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				500.000		280.000		285.000		293.000		300.000		311.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	500.000	1	280.000	1	285.000	1	293.000	1	300.000		311.000		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.110.000		750.000		765.000		784.000		806.000		833.000		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,79	85,80-88,82	1.110.000	85,82-88,84	750.000	85,84-88,86	765.000	85,86-88,88	784.000	85,88-88,90	806.000	85,90-88,92	833.000		
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.110.000		750.000		765.000		784.000		806.000		833.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.110.000	1	750.000	1	765.000	1	784.000	1	806.000	1	833.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.461.480		232.611.500		237.342.500		243.366.000		249.981.500		258.591.500		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,97	75,97	198.461.480	75,98	232.611.500	75,99	237.342.500	76	243.366.000	76,01	249.981.500	76,02	258.591.500		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.711.990		9.751.500		9.950.000		10.202.000		10.479.000		10.840.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.711.990	1	9.751.500	1	9.950.000	1	10.202.000	1	10.479.000	1	10.840.000		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.975.990		75.432.500		76.967.000		78.920.000		81.066.000		83.858.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	42.975.990	2	75.432.500	2	76.967.000	2	78.920.000	2	81.066.000	2	83.858.000		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.507.500		25.617.500		26.138.500		26.802.000		27.530.000		28.478.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	18.507.500	2	25.617.500	2	26.138.500	2	26.802.000	2	27.530.000	2	28.478.000		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.720.000		3.720.000		3.795.000		3.892.000		3.998.000		4.135.500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.720.000	1	3.720.000	1	3.795.000	1	3.892.000	1	3.998.000	1	4.135.500		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				123.546.000		117.650.000		120.043.000		123.090.000		126.436.500		130.791.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	123.546.000	1	117.650.000	1	120.043.000	1	123.090.000	1	126.436.500	1	130.791.000		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						440.000		449.000		460.000		472.000		489.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	440.000	1	449.000	1	460.000	1	472.000	1	489.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				122.232.500		51.687.500		52.739.000		54.097.000		55.548.000		57.460.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	122.232.500	5	51.687.500	5	52.739.000	5	54.097.000	5	55.548.000	5	57.460.000		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				87.200.000		12.000.000		12.244.000		12.575.000		12.896.000		13.340.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	87.200.000	1	12.000.000	1	12.244.000	1	12.575.000	1	12.896.000	1	13.340.000		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.032.500		39.687.500		40.495.000		41.522.000		42.652.000		44.120.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	35.032.500	1	39.687.500	1	40.495.000	1	41.522.000	1	42.652.000	1	44.120.000		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.010.000		254.960.000		260.146.500		266.748.500		274.003.000		283.438.000		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	252.010.000	100	254.960.000	100	260.146.500	100	266.748.500	100	274.003.000	100	283.438.000		
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.900.000		10.350.000		10.560.500		10.828.500		11.123.000		11.506.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	9.900.000	1	10.350.000	1	10.560.500	1	10.828.500	1	11.123.000	1	11.506.000		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.800.000		4.800.000		4.898.000		5.022.000		5.160.000		5.336.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.898.000	1	5.022.000	1	5.160.000	1	5.336.000		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				237.310.000		239.810.000		244.688.000		250.898.000		257.720.000		266.596.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	237.310.000	1	239.810.000	1	244.688.000	1	250.898.000	1	257.720.000	1	266.596.000		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				457.326.170		466.376.500		475.862.160		487.939.000		501.210.000		518.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	457.326.170	5	466.376.500	5	475.862.160	5	487.939.000	5	501.210.000	5	518.470.000		
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.754.450		26.940.000		27.488.000		28.185.000		28.952.000		29.950.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.754.450	1	26.940.000	1	27.488.000	1	28.185.000	1	28.952.000	1	29.950.000		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				174.377.720		180.142.500		183.806.500		188.471.000		193.600.000		200.264.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	174.377.720	30	180.142.500	30	183.806.500	30	188.471.000	30	193.600.000	30	200.264.000		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.194.000		102.294.000		104.374.660		107.023.000		109.933.000		113.720.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	86	86	61.194.000	86	102.294.000	86	104.374.660	86	107.023.000	86	109.933.000	86	113.720.000		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.000.000		157.000.000		160.193.000		164.260.000		168.725.000		174.536.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	195.000.000	1	157.000.000	1	160.193.000	1	164.260.000	1	168.725.000	1	174.536.000		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.114.015.500		1.012.649.000		1.033.245.610		1.059.471.306		1.088.273.716		1.125.748.857		
Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	81,99	88,6	1.114.015.500	82,62	1.012.649.000	82,96	1.033.245.610	83,3	1.059.471.306	83,65	1.088.273.716	83,99	1.125.748.857	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.031.064.250		1.006.185.000		1.026.650.300		1.052.707.050		1.081.330.100		1.118.570.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan	100	100	1.031.064.250	100	1.006.185.000	100	1.026.650.300	100	1.052.707.050	100	1.081.330.100	100	1.118.570.900		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				7.685.000		4.125.000		4.208.900		4.315.700		4.433.000		4.585.700		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	30	25	7.685.000	20	4.125.000	15	4.208.900	15	4.315.700	15	4.433.000	15	4.585.700		
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				734.100.000		741.268.000		756.345.000		775.541.400		796.628.400		824.064.000		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	60.005	60.010	734.100.000	60.010	741.268.000	60.010	756.345.000	60.010	775.541.400	60.010	796.628.400	60.010	824.064.000		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				233.868.250		214.150.000		218.505.800		224.051.400		230.143.400		238.069.500		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5	5	233.868.250	5	214.150.000	5	218.505.800	5	224.051.400	5	230.143.400	5	238.069.500		
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				55.411.000		46.642.000		47.590.600		48.798.550		50.125.300		51.851.700		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	7.250	7.300	55.411.000	7.350	46.642.000	7.400	47.590.600	7.450	48.798.550	7.500	50.125.300	7.550	51.851.700		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				82.951.250		6.464.000		6.595.310		6.764.256		6.943.616		7.177.957		
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	96,61	97,00	82.951.250	97,5	6.464.000	97,67	6.595.310	97,75	6.764.256	97,8	6.943.616	97,83	7.177.957		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				82.951.250		6.464.000		6.595.310		6.764.256		6.943.616		7.177.957		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5	6	82.951.250	2	6.464.000	2	6.595.310	2	6.764.256	2	6.943.616	2	7.177.957		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				589.486.000		515.683.000		526.171.650		539.526.866		554.194.252		573.278.152		
Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase)	95,09	99,79	589.486.000	95,31	515.683.000	95,34	526.171.650	95,37	539.526.866	95,4	554.194.252	95,43	573.278.152	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				589.486.000		480.118.000		489.875.000		502.316.000		515.904.000		533.744.100		
Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	100	100		100	480.118.000	100	489.875.000	100	502.316.000	100	515.904.000	100	533.744.100		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				111.339.000		96.218.000		98.175.000		100.666.000		103.404.000		106.965.100		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	550	550	111.339.000	550	96.218.000	550	98.175.000	550	100.666.000	550	103.404.000	550	106.965.100		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				361.842.000		383.900.000		391.700.000		401.650.000		412.500.000		426.779.000		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	10.000	10.000	361.842.000	10.000	383.900.000	10.000	391.700.000	10.000	401.650.000	10.000	412.500.000	10.000	426.779.000		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				116.305.000		35.565.000		36.296.650		37.210.866		38.290.252		39.534.052		
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pencatatan sipil	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil	91,60	91,67	116.305.000	91,78	35.565.000	92	36.296.650	92,27	37.210.866	92,56	38.290.252	92,86	39.534.052		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				116.305.000		35.565.000		36.296.650		37.210.866		38.290.252		39.534.052		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	3	7	116.305.000	3	35.565.000	3	36.296.650	3	37.210.866	3	38.290.252	3	39.534.052		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.183.764.550		702.519.500		716.808.281		735.002.209		754.983.718		780.981.884		
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Rerata Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persentase)	53	0	1.183.764.550	76	702.519.500	80	716.808.281	84	735.002.209	88	754.983.718	88	780.981.884	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				50.625.000		49.466.000		50.471.970		51.752.800		53.160.000		54.991.000		
Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	100	100	50.625.000	100	44.148.000	100	45.045.970	100	46.189.000	100	47.445.000	100	49.079.000		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				50.625.000		44.148.000		45.045.970		46.189.000		47.445.000		49.079.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2	0	50.625.000	1	44.148.000	1	45.045.970	1	46.189.000	1	47.445.000	1	49.079.000		
Tersajinya Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	100	100	50.625.000	100	5.318.000	100	5.426.000	100	5.563.800	100	5.715.000	100	5.912.000		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0		5.318.000		5.426.000		5.563.800		5.715.000		5.912.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	0	0	2	5.318.000	2	5.426.000	2	5.563.800	2	5.715.000	2	5.912.000		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.133.139.850		641.999.500		655.056.000		671.682.000		689.946.000		713.708.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
&Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan&	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67,5	70	111.152.400	70,5	82.832.000	71	84.516.000	71,5	86.661.000	72	89.018.000	72,5	92.084.000		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				111.152.400		82.832.000		84.516.000		86.661.000		89.018.000		92.084.000		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	4	111.152.400	2	82.832.000	2	84.516.000	2	86.661.000	2	89.018.000	2	92.084.000		
Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	0	20	1.011.698.350	40	559.167.500	60	570.540.000	80	585.021.000	100	600.928.000	100	621.624.000		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.011.698.350		559.167.500		570.540.000		585.021.000		600.928.000		621.624.000		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	1.011.698.350	2	559.167.500	2	570.540.000	2	585.021.000	2	600.928.000	2	621.624.000		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		11.054.000		11.280.311		11.567.409		11.877.718		12.282.884		
Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan SOP SMKI	Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	0	0	0	82,14	11.054.000	83,04	11.280.311	83,93	11.567.409	84,82	11.877.718	85,71	12.282.884		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						11.054.000		11.280.311		11.567.409		11.877.718		12.282.884		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	0	0	0	1	11.054.000	1	11.280.311	1	11.567.409	1	11.877.718	1	12.282.884		

Sumber: Renstra Dindukcapil Tahun 2025-2029

4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis dari Wali Kota terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi-Misi calon kepala daerah di KPUD, meliputi:

1) Meningkatkan derajat pendidikaan warga, melalui program uggulan: a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2) Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program uggulan: a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan c. Satu Kampung Satu Bidan
3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program uggulan: a. Bela Beli Produk Warga b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan: a. Revitalisasi Kampung Wisata b. Ekonomi Olahraga; dan c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5) Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program uggulan: a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi. b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan: a. Bapak Asuh Keluarga Miskin b. Kampung Layak Huni c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7) Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program uggulan: a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.
8) Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan: a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah b.

Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan c. Jogja Tangguh Bencana Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu.

Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung :

- Visi RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban.
- Misi RPJMD ke-4 Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.
- Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
- Sasaran: Meningkatnya keberdayaan masyarakat
- Indikator Tujuan/ Sasaran: Indeks Keberdayaan Masyarakat
- Program Strategis Walikota: 6.1 Bapak Asuh Keluarga Miskin, dengan program prioritas RPJMD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta seperti pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.	Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
2	Kartu Keluarga : Jaminan Kesehatan Warga	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
3	Bapak Asuh Keluarga Miskin	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

Sumber: SIPD RI, 2025

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKD mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas yang diklasifikasikan ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Baik IKU maupun IKD berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan. publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU dan IKD, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam Tabel 4.5. berikut

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.	Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Nilai	84,97	85,79	88,68	89,53	90,39	91,24	91,56	
3.	Indeks tertib administrasi kependudukan	Nilai	79,78	81,09	86,36	87,57	88,77	89,98	90,12	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	AA (91,548)	AA (91,548 - 94,548)	AA (91,553 - 94,553)	AA (91,558 - 94,558)	AA (91,563 - 94,563)	AA (91,568 - 94,568)	AA (91,573 - 94,573)	

Sumber: SIPD RI, 2025

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah diperlukan tolak ukur untuk mengukur kinerja yang juga merupakan tolak ukur dalam penyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kemudian disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki IKK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	positif	Persentase	68,29	70,73	73,17	75,61	78,05	80,49	82,93	
3.	Kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 4 thn	positif	Persentase	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	99,99	
4.	Perekaman KTP elektronik	positif	Persentase	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65	99,7	
5.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	positif	Persentase	87,23	88,22	89,23	90,23	91,23	92,23	93,22	

Sumber: SIPD RI, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat visi daerah, misi daerah, tujuan, sasaran Perangkat Daerah serta strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Renstra Perangkat daerah ini disusun sebagai upaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Perangkat daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2029.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara komulatif dari tahun 2025-2029 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2029.

Di samping itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi program periode sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, telah melibatkan peran stakeholders yang ada dalam upaya menghasilkan Renstra yang dapat menampung aspirasi yang ada, serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. POHON KINERJA

POHON KINERJA DINAS DUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025-2029

TUJUAN DAERAH

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif

SASARAN DAERAH

Meningkatnya AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
Indikator Kinerja:
Nilai AKIP

TUJUAN OPD

TUJUAN OPD

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima
Indikator Kinerja: Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan

SASARAN OPD

SASARAN OPD (Ultimate Outcome) 1

1.1 Meningkatnya cakupan layanan dokumen adminstrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan
Indikator Kinerja (IK): Indeks tertib administrasi kependudukan
2.1 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif
Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN PROGRAM

CSF 1 (Critical Success Factor)	CSF 2	CSF 3
Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan Indikator Kinerja: Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil Indikator Kinerja: Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan Indikator Kinerja: Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

SASARAN KEGIATAN

Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome	Initianl Outcome
Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan Indikator Kinerja: Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pendaftaran penduduk Indikator Kinerja: Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas penerbitan layanan dokumen pencatatan sipil Indikator Kinerja: Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pencatatan sipil Indikator Kinerja: Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil	Tersejnya Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun Indikator Kinerja: Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Indikator Kinerja: Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja: Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosalisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja: Persentase Kehadiran Peserta Sosalisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan SOP SMKI Indikator Kinerja: Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan

SASARAN OPERASIONAL

Output:	Output	Output:	Output:	Output	Output	Output:	Output:	Output:	Output:	Output:	Output:	Output:
Terlaksananya pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk Indikator Kinerja: jumlah penduduk yang terlayani	Terselenggaranya inovasi layanan adminduk Indikator Kinerja: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Terlaksananya sosialisasi pendaftaran penduduk Indikator Kinerja: Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen pencatatan sipil Indikator Kinerja: jumlah layanan jemput bola Akta Kelahiran	Terselenggaranya inovasi layanan adminduk Indikator Kinerja: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan	Terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil Indikator Kinerja: Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Terlaksananya sosialisasi pencatatan sipil Indikator Kinerja: Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah Buku Profil dan Data Agregat Kependudukan (DAK) tercetak	Terlaksanana kerjasama pemanfaatan data Indikator Kinerja: Jumlah PKS Pemanfaatan Data	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Perangkat Keras / Lunak Layanan Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah Perangkat Keras / Lunak Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diadakan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah Peserta yang mendapatakan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah Peserta yang mendapatakan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan

Output:	Output:	Output:	Output:
Penerbitn dokumen pindah datang penduduk Indikator Kinerja: Jumlah dokumes pindah dan datang	Terlayaninyu permohonan dokumen adminduk bagi penduduk rentan Indikator Kinerja: jumlah permohonan penduduk rentan yang terverifikasi	Peningkatan kinerja kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) bidang kependudukan Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen KK, KTP, KIA yang dibantu penerbitannya oleh Kader GISA	Peningkatan kinerja kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) bidang pencatatan sipil Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dibantu penerbitannya oleh Kader GISA

Crosscutting

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
Dinas Pendidikan melalui sekolah	Tempat pelaksanaan jemput bola dalam perekaman KTP-El bagi masyarakat pemula
DPMPTSP	Fasilitas sarpras tempat pelayanan rekam dan cetak KTP dan KIA, dan inovasi Mantap
Dinsosnakertran	Penyediaan data kependudukan untuk pelaksanaan layanan
Bagian Perekonomian dan Kersa Sama Sekda Kota Yogyakarta	Terlaksananya Kerjasama pelayanan Adminduk dengan instansi terkait
14 Kemantren	Pelayanan Administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Kemantren
45 Kelurahan	Pelayanan Administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Kelurahan
Kemenag melalui KUA	Mendukung kegiatan inovasi Mantap dalam pemberian dokumen kependudkan setelah berlangsungnya akad nikah
Lembaga Pemasyarakatan Anak	Pelayanan dokumen kependudukan anak baik KIA, KTP El maupun akta kelahiran khususnya untuk anak-anak yang bermasalah hukum
Pengadilan Agama	layanan perekaman status perkawinan melalui inovasi Pengkasi
Pengadilan Negeri	pelayanan pencatatan sipil yang bermasalah dan memerlukan penetapan pengadilan
Rumah Sakit	Pelayanan dokumen kependudukan anak baik KIA, KK maupun akta kelahiran
Lembaga Agama	pelayanan akta perkawinan pada inovasi Mantul
Kader Gisa, ketua RT RW	Penggerak masyarakat untuk mewujudkan tertib adminduk

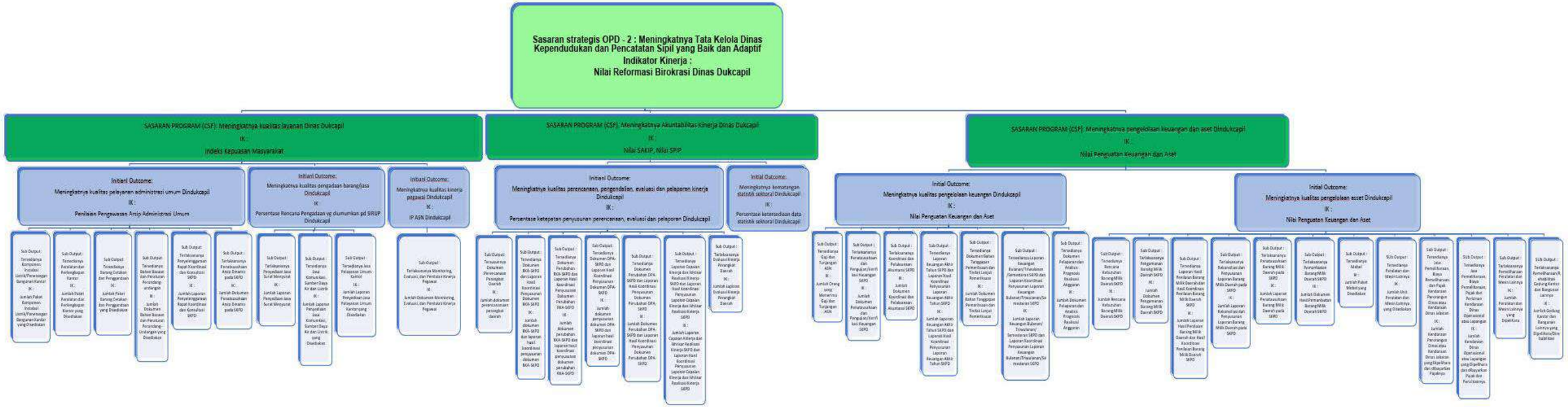

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting (Dukungan Koordinasi, Pendampingan dan Pembinaan Administrasi terkait SPIP, LKIP, RB)
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

LAMPIRAN 2. CASCADING

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
1	**Tulis Nama Perangkat Daerah**	**Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa dijenjangkan)**	**Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator tujuan**	**Tulis Sasaran Stratagis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Sasaran Stratagis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator sasaran**	**Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen terbaru th 2024 di halaman 1480**	**Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediat e Outcome/ CS F pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator program**	**Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program**	**Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen terbaru th 2024 di halaman 1480**	**Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initia l Outcome pada Pohon Kinerja OPD**	**Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan**	**Tulis Nama Bidang/Seksi Yang mengampu indikator kegiatan**	**Tulis Nama Sub Kegiatan yang diambil dari Kepmen terbaru th 2024 di halaman 1480**	**Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD**	**Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja**	**Tulis Nama Seksi/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan**	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1.1. Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima**	**Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan**	**(Indeks teritib administrasi kependudukan + Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil)/2**	**Meningkatn ya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan**	**Indeks tertib administrasi kependudukan**	**(75% x ((Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan + cakupan layanan kepemilikan dokumen pencatatan sipil)/2)) + (25% x Rerata Pengelolaan dan Pemanfaatan**	**1.1.1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	(Rerata persentase cakupan kepemilikan dokumen KTP- El, Kartu Identitas Anak (KIA), Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) + Rerata persentase cakupan layanan	**Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**1.1.1.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan	(Jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang memenuhi standar pelayanan/jumlah dokumen yang diterbitkan) x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**	Terlayaninya permohonan dokumen adminduk bagi pendudukrentan	jumlah permohonan penduduk rentan yang terverifikasi	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
																		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk	
																		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksanany a pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk	jumlah penduduk yang terlayani	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk	
																			Terselenggaranya inovasi layanan adminduk	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk	
																			Peningkatan kinerja kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) bidang kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP, KIA yang dibantu penerbitannya oleh Kader GISA	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk	
																		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Peneribitan dokumen pindah datang penduduk	Jumlah dokumen pindah dan datang	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
													1.1.1.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	(Jumlah Peserta yang Hadir dalam Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dibagi jumlah seluruh undangan sosialisasi Pendaftaran Penduduk) x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Sosialisasi Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Pendafatraan Penduduk	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
								1.1.2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rerata Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian)	**Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	**1.1.2.1 Pelayanan Pencatatan Sipil**	Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	(Jumlah permohonan dokumen pencatatan sipil yang memenuhi standar pelayanan/jumlah dokumen yang diterbitkan) x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting**	Terlaksanaanya penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
																		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen pencatatan sipil	jumlah layanan jemput bola Akta Kelahiran	Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian	
																			Terselenggaranya inovasi layanan adminduk	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan	Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian	
																			Peningkatan kinerja kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) bidang pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dibantu penerbitannya oleh Kader GISA	Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian	
													1.1.2.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pencatatan sipil	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil	(Jumlah Peserta Hadir dalam Sosialisasi Pencatatan Sipil dibagi jumlah seluruh undangan sosialisasi Pencatatan Sipil) x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	**Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil**	Terlaksanaanya sosialisasi pencatatan sipil	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi pencatatan sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
								1.1.3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Optimalisasi Aplikasi SIAK yang sudah dilaksanakan dibagi Jumlah Optimalisasi Aplikasi SIAK yang direncanakan	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**	1.1.3.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersajinya Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	(Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kota yang disusun dibagi Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kota yang wajib disusun) x 100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Profil dan Data Agregat Kependudukan (DAK) tercetak	Ketua Tim Kerja Pengeloaan Informasi Administrasi kependudukan	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
													1.1.3.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi	(Jumlah OPD yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil dibagi Jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data kepada Dirjen Dukcapil) x 100%'Jumlah OPD yang sudah memiliki Perjanjian Kerja	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data	Jumlah PKS Pemanfaatan Data	Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	
													1.1.3.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana	(Jumlah SOP SMKI yang diimplementasikan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan / Jumlah Keseluruhan SOP SMKI) x 100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kpendudukan	Terlaksananya Pemeliharaan Perangkat Keras/Lunak Layanan Administarsi Kependudukan	Jumlah Perangkat Keras/Lunak Pelayanan Administarsi Kependudukan yang terpelihara	Ketua Tim Kerja Pengeloaan Informasi Administrasi kependudukan	
																		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kpendudukan	Terfasilitasinya Perangkat Keras untuk Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perangkat Keras untuk Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengeloaan Informasi Administrasi kependudukan	
																		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kpendudukan	Terlaksanany a Pengamanan Informasi sesuai dengan SOP SMKI	Jumlah Pengamanan Informasi telah diterapkan	Ketua Tim Kerja Pengeloaan Informasi Administrasi kependudukan	
														Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(Jumlah Peserta Hadir dalam Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Jumlah seluruh undangan sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) x 100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi	Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
													1.1.3.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan SOP SMKI	Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	(Jumlah Peserta Hadir Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) / Jumlah seluruh Undangan Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) x 100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan	Ketua Tim Kerja Pengeloaan Informasi Administrasi kependudukan	
					2.1 Meningkatn ya Tata Kelola Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian RB Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	**2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA**	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dindukcapil Nilai SPIP Dindukcapil Nilai IKM Dindukcapil	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat - Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat - Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretaris Dinas Dukcapil	1.2.1.1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kependudukan	- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib disusun	Sekretaris	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Subag Keuangan PEP	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
																		X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subag Keuangan PEP	
													1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh BPKAD	Sekretaris	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dikelola gaji dan tunjangannya	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah akuntansi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlaksana	Subag Keuangan PEP	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
																		X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	Subag Keuangan PEP	
																		X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun	Subag Keuangan PEP	
													1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan Keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh BPKAD	Sekretaris	X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
																		X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
													1.2.1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh BPKAD	Sekretaris	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
													1.2.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh BPKAD	Sekretaris	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
													1.2.1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Sekretaris	"X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
													1.2.1.7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian IP ASN Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh BKPSDM	Sekretaris	X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
													1.2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

																		X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
																		X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

Telepon
(0274) 563925, 557062, 587490

Email
dukcapil@jogjakota.go.id

Website
dindukcapil.jogjakota.go.id

Alamat
Jl. Kenari No. 56 Umbulharjo,
Yogyakarta

KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

Jl. Imogiri No 1 Yogyakarta
Telp. (0274) 410002
Fax. (0274) 410002

EMAIL :
perhubungan@jogjakota.go.id

WEBSITE :
www.perhubungan.jogjakota.go.id

dishubkotayogya

dishubkotayogya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan program kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta dan arahan kebijakan nasional di bidang transportasi. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi, konektivitas, dan keselamatan bagi masyarakat, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan transportasi di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, September 2025

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197709071996031001

DAFTAR ISI

BAB I 12
PENDAHULUAN 12
1.1. Latar Belakang 12
1.2. Landasan Hukum 13
1.3. Maksud & Tujuan 15
1.4. Sistematika Penulisan 16
BAB II 18
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan 18
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan 18
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan 6
2.1.2.1. Keadaan Pegawai 6
2.1.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana 8
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan 10
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan 9
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan 9
2.2.2. Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan 10
BAB III 16
3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 17
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 17
3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 20
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 22
BAB IV 26
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 27
4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 41
4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 43
BAB V 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta per Desember Tahun 2025 6
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 7
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang 7
Tabel 2. 4 Jumlah pegawai berdasarkan beban kerja 8
Tabel 2. 5 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan 9
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan 5 (Lima) Tahun Terakhir 6
Tabel 2. 7 Pencapaian Pendanaan Dinas Perhubungan 5 (Lima) Tahun Terakhir 7
Tabel 2. 8 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan 12

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 18
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra 21
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025–2029 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 6

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 -2029
2. Data Kinerja dan Cascading Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kelancaran arus barang dan jasa, peningkatan konektivitas wilayah, serta kualitas pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam urusan perhubungan.

Dalam lima tahun terakhir, Kota Yogyakarta menghadapi dinamika transportasi yang semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, sementara kapasitas jalan relatif tetap. Hal ini menimbulkan kemacetan di kawasan pusat kota, terutama di kawasan wisata, pendidikan, dan perdagangan. Arus kunjungan wisatawan yang datang dengan bus pariwisata menambah beban lalu lintas, di sisi lain ketersediaan lahan parkir di dalam kota semakin terbatas. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi manajemen mobilitas perkotaan yang lebih inovatif, termasuk pengembangan angkutan umum yang ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan transportasi.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan komitmen global, Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu merespons tantangan keberlanjutan. Isu pengendalian emisi, efisiensi energi, serta digitalisasi layanan menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang modern dan inklusif. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi regulatif dan operasional, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator perubahan menuju transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, lancar, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, khususnya mendukung Misi ke-2: Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari, pada Arah Kebijakan Ke-6 : Peningkatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:

a. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
b. Meningkatkan sinergi dan kerja sama penyediaan angkutan umum yang berkualitas
c. Meningkatkan tata kelola perparkiran

Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan sektor perhubungan untuk lima tahun ke depan, dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi memiliki panduan yang selaras, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud & Tujuan

1. Maksud

Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek Perhubungan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;

b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;

c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;

d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;

e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;

f. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025-2029 dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAEAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :
   a. Sekretariat, terdiri dari :
      (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      (2) Sub Bagian Keuangan; dan
      (3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
   b. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
      (1) Kelompok Substansi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
      (2) Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
      (3) Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas
   c. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, terdiri dari :
      (1) Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan;
      (2) Seksi Angkutan Jalan; dan
      (3) Seksi Pengendalian Operasional.
   d. Bidang Perparkiran terdiri dari :
      (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir; dan
      (2) Seksi Retribusi Parkir .
   e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
3. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

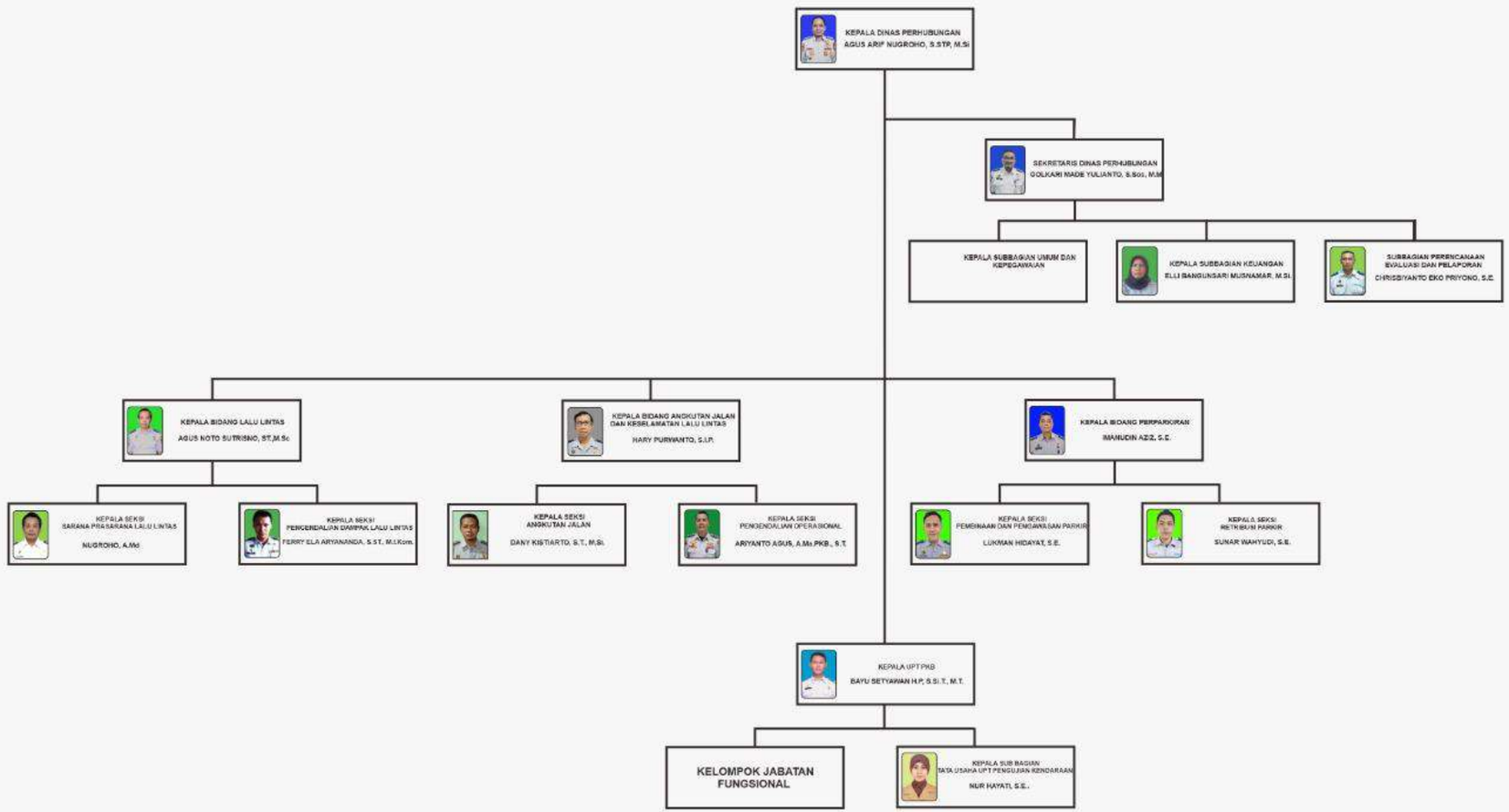

GAMBAR 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.1.2.1. Keadaan Pegawai

a. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2025

Pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 orang. Komposisi pegawai sebagai berikut :

Berdasarkan Jabatan

TABEL 2. 1 JUMLAH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA PER DESEMBER TAHUN 2025

No.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Pembina Tk I / Gol IV c	1
2.	Sekretaris	Pembina Tk I / Gol IV b	1
3.	Kepala Bidang	Pembina / Gol IV a Penata Tk I/III d	2 1
4.	Kasubbag/ Kasie/ UPT	Pembina / Gol IV a Penata Tk I/ III d	2 8
5.	Staf	Penata Tk I / III d Penata / III c Penata Muda Tk I / III b Penata Muda / III a Pengatur Tk I / II d Pengatur / II c Pengatur Muda Tk I / II b Pengatur Muda / II a Juru Tk I / Id Juru / I c Juru Muda Tk I / Ib Juru Muda / Ia	5 3 14 8 7 7 1 2 0 0 0 0
	Jumlah		62

TABEL 2. 2 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

No	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata - 3	-	-	-
2.	Strata - 2	8	3	11
3.	Strata -1	12	2	14
4.	Diploma - 4	1	1	2
5.	Diploma - 3	9	4	13
6.	Diploma - 2	1	0	1
7.	Diploma - 1	0	0	0
8.	SMA	18	0	18
9.	SMP	3	0	3
10.	SD	0	0	0
	Jumlah	52	10	62

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan

TABEL 2. 3 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG

NO.	UNIT	JUMLAH PERSONIL			
		PNS	CPNS	NABAN	TOTAL
1.	Sekretariat	12	-	4	16
2.	Bidang Lalu Lintas	10	-	10	20
3.	Bidang Angkutan Jalan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional	11	-	31	42
4.	Bidang Perparkiran	14	-	1	15
5.	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	15	-	2	17
Jumlah		62	0	48	110

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan

TABEL 2. 4 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	UNIT	Pegawai		
		Beban Kerja	Kondisi 2025	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Jabatan Fungsional	16	14	2
3.	PKB	4	2	2
4.	Sekretariat	19	11	8
5.	Bidang Lalu Lintas	28	9	19
6.	Bidang Angkutan Jalan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional	44	11	33
7.	Bidang Perparkiran	19	14	5
	Jumlah	131	62	69

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan

Jumlah Pegawai yang ideal sesuai dengan beban kerja sebanyak 131 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang. Untuk menutup kekurangan pegawai, Dinas Perhubungan dibantu dengan 48 Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP) dan masih ada kekurangan sebanyak 21 orang.

2.1.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

✓ Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Jalan Imogiri Timur Nomor 1 Yogyakarta, Telephone 0274-410002.

- Ruang rapat : 2 ruang
- Ruang Reparasi APILL dan Rambu : 1 ruang
- Tempat Parkir : 2 tempat

- ✓ Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta, Telephone 0274-410016.

b. Kendaraan Dinas

- ✓ Kendaraan Roda 4 (empat) / Mobil sebanyak 15 Unit :
  - 1 unit Mobil Dinas Kepala Dinas.
  - 1 unit Mobil Dinas Sekretaris Dinas
  - 1 unit mobil pick-up untuk Pemeliharaan Rambu, Marka dan Lampu Lalu Lintas (APILL).
  - 1 unit mobil pick-up untuk operasional penegakan peraturan daerah.
  - 1 unit mobil APV untuk operasional Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  - unit mobil Toyota Rush untuk operasional parkir
  - unit mobil vios untuk kendaraan patroli
  - 1 unit mobil baleno untuk kendaraan patroli
  - 1 unit pick up untuk operasional UPT PKB
  - 1 unit truck skylift untuk operasional APILL
  - 1 unit mobil APV untuk operasional Sekretariat Umum
  - 1 unit double cabin untuk operasional Bidang Dalops
  - 1 unit bus sekolah
  - 1 unit mobil pick up untuk operasional Taman Keselamatan Lalu Lintas
- ✓ Kendaraan Roda 2 (dua) sepeda motor sebanyak 45 buah :
  - 43 kendaraan untuk operasional Dinas Perhubungan
  - 2 kendaraan operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

c. Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

TABEL 2. 5 PERBANDINGAN SARANA PRASARANA DENGAN KEBUTUHAN

No.	Uraian	Kebutuhan	Kondisi 2025	Keterangan
1.	Ruang rapat	3	2	
2.	Tempat Parkir	2	2	

No.	Uraian	Kebutuhan	Kondisi 2025	Keterangan
3.	Ruang reparasi APIIL dan rambu	1	1	Ruangan tidak memadai dan terlalu sempit
4.	Tempat penyimpanan sapras rambu	1	-	Belum ada ruangan yang khusus untuk penyimpanan
5.	Ruang Laktasi	1	-	
6.	Perpustakaan	1	1	
7.	Ruang Merokok	1	-	
8.	Kendaraan roda 4	16	15	Belum ada mobil dengan desain khusus untuk mobil keliling sosialisasi keselamatan lalu lintas
9.	Kendaraan roda 2	50	45	

Sumber : Data Pengurus Barang Dinas Perhubungan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang transportasi

TABEL 2. 6 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Service*)	0,799	0,430	0,798	0,530	0,798	0,645	-	-	-	-
	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Jalan (*Kecepatan rata-rata kendaraan*)	-	-	-	-	-	-	25,001 km/jam	26,20 km/jam	25,002 km/jam	25,76 km/jam
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A

Selama periode 2020–2022, pengukuran kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih mengacu pada indikator Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LoS) sebagaimana tertuang dalam Renstra 2017–2022. Indikator ini dipilih karena secara teoritis LoS menggambarkan kualitas pelayanan lalu lintas berdasarkan rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan, dengan nilai berkisar antara 0 (sangat lancar) sampai 1 (kapasitas penuh). Dengan demikian, semakin kecil nilai LoS menunjukkan kondisi lalu lintas yang semakin baik.

Hasil pengukuran tahun 2020–2022 menunjukkan capaian yang konsisten berada di bawah target. Pada tahun 2020, target LoS ditetapkan 0,799 dengan realisasi 0,430. Tahun 2021 target 0,798 dengan realisasi 0,530, dan tahun 2022 target 0,798 dengan realisasi 0,645. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak mencapai angka target yang ditetapkan, arus lalu lintas justru relatif lebih baik karena nilai realisasi mendekati nol. Namun demikian, capaian ini tetap perlu diinterpretasikan secara hati-hati mengingat pengukuran LoS di tingkat kota menghadapi keterbatasan ketersediaan data yang lengkap dan real time, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan kendaraan bermotor, aktivitas pariwisata, dan keterbatasan ruang jalan tetap menjadi tantangan utama.

Sejalan dengan berakhirnya Renstra 2017–2022, indikator kinerja lalu lintas kemudian diperbarui dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perhubungan 2023–2026. Indikator Tingkat Pelayanan Jalan diganti menjadi Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (km/jam), yang dinilai lebih operasional, terukur, serta sesuai dengan praktik manajemen transportasi perkotaan. Kecepatan rata-rata dianggap lebih representatif dalam menilai kelancaran lalu lintas karena dapat diperoleh dari sistem pemantauan lalu lintas (ATCS, CCTV, maupun survei lapangan) dan langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan.

Hasil pengukuran pada tahun 2023 menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan sebesar 26,20 km/jam, dan pada 2024 sedikit menurun menjadi 25,76 km/jam. Meskipun terjadi penurunan, capaian tersebut tetap melampaui target tahunan (25,001–25,002 km/jam) dan menunjukkan kondisi lalu lintas yang relatif stabil. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan kendaraan, upaya manajemen lalu lintas (rekayasa lalu lintas, penataan

parkir, pemanfaatan ATCS) mampu menjaga kelancaran pada tingkat yang cukup baik. Secara teoritis, kecepatan rata-rata 25–26 km/jam masih dapat dikategorikan sebagai kondisi lalu lintas yang padat tetapi tetap lancar untuk kawasan perkotaan dengan kepadatan aktivitas tinggi seperti Kota Yogyakarta.

Selain indikator lalu lintas, sejak tahun 2023 Dinas Perhubungan juga melaporkan indikator baru yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Indikator ini muncul atas arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperkuat aspek tata kelola dan akuntabilitas birokrasi. Hasil penilaian tahun 2023 dan 2024 menunjukkan nilai “A”, yang mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan sudah berada pada kategori sangat baik.

Dengan demikian, pergeseran indikator dari LoS ke Kecepatan Rata-Rata Kendaraan serta penambahan indikator Reformasi Birokrasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengukuran kinerja. Indikator baru lebih relevan, mudah dipantau, serta mampu menggambarkan secara nyata tantangan transportasi perkotaan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 2. 7 PENCAPAIAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	15.434.690.273	13.662.738.371,02	88,52
2.	2021	20.739.932.004	19.304.062.811,78	93,08
3.	2022	22.045.683.799	20.839.081.614	94,53
4.	2023	24.467.499.297	23.437.903.376	95,79
5.	2024	25.282.532.605	24.353.657.868	96,33

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberikan layanan kepada berbagai kelompok sasaran yang langsung maupun tidak langsung memanfaatkan pelayanan transportasi. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat umum, yaitu seluruh warga Kota Yogyakarta dan pendatang yang menggunakan jalan, fasilitas lalu lintas, maupun layanan transportasi di wilayah kota.
2. Pengguna jasa angkutan umum, baik angkutan perkotaan, angkutan pariwisata, angkutan tidak bermotor maupun transportasi daring/lainnya yang beroperasi di wilayah kota.
3. Pengemudi dan operator angkutan jalan, termasuk pengemudi bus, taksi, kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan online yang memerlukan pelayanan, trayek, dan pengaturan lalu lintas.
4. Pelaku usaha dan penyedia jasa transportasi, seperti operator terminal, pengelola tempat parkir, dan pemilik kendaraan umum yang wajib melakukan uji berkala (KIR).
5. Wisatawan dan pengunjung Kota Yogyakarta, yang membutuhkan transportasi aman, lancar, dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas pariwisata.
6. Instansi/lembaga terkait, seperti kepolisian, BPTD, komunitas transportasi, lembaga pendidikan, serta perangkat daerah lain yang membutuhkan dukungan teknis transportasi.
7. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, yang menjadi sasaran penting dalam penyediaan layanan transportasi yang aksesibel, aman, dan inklusif.

Dengan demikian, layanan Dinas Perhubungan tidak hanya terbatas pada masyarakat pengguna jalan, melainkan juga mencakup seluruh pemangku kepentingan transportasi perkotaan. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat diarahkan secara tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan tahun 2020–2024 serta analisis kondisi transportasi perkotaan di Kota Yogyakarta, terdapat sejumlah permasalahan pokok yang masih dihadapi, yaitu:

1. Tingkat pelayanan lalu lintas yang masih rendah → ditandai dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang relatif stagnan (25–26 km/jam), menunjukkan kapasitas jalan belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan.
2. Keterbatasan lahan parkir di kawasan pusat kota dan destinasi wisata, yang memicu parkir tidak pada tempatnya dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Penggunaan angkutan umum yang masih rendah → pangsa moda angkutan umum belum signifikan dibanding kendaraan pribadi, akibat keterbatasan jumlah armada, jangkauan trayek, dan kenyamanan layanan.
4. Keselamatan lalu lintas → angka kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi, terutama yang melibatkan sepeda motor dan kelompok usia produktif.
5. Beroperasinya jalan tol yang melewati Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga menyebabkan banyaknya kendaraan masuk ke Kota Yogyakarta.
6. Kepatuhan uji kendaraan bermotor (KIR) masih belum maksimal, ditandai dengan masih adanya kendaraan wajib uji yang belum melaksanakan uji berkala tepat waktu.
7. Pemanfaatan teknologi transportasi (ATCS, *e-parking*, aplikasi informasi lalu lintas) masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

2.2.2. Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah serta analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi dan tidak seimbang dengan kapasitas jaringan jalan perkotaan yang terbatas, sehingga meningkatkan potensi kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan.
2. Belum optimalnya transportasi publik, keterbatasan simpul transportasi, dan menurunnya jumlah halte Transjogja, yang menyebabkan rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
3. Kebutuhan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan, dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian Kota Yogyakarta.
4. Perubahan pola mobilitas masyarakat menuju transportasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi digital (smart mobility), sehingga menuntut penguatan sistem manajemen lalu lintas cerdas (ATCS, integrasi aplikasi, e-ticketing).
5. Tuntutan pengembangan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk implementasi kebijakan nasional penggunaan kendaraan listrik dan target penurunan emisi karbon.
6. Keselamatan lalu lintas sebagai prioritas nasional, yang membutuhkan penguatan manajemen keselamatan berbasis data, peningkatan kepatuhan uji KIR angkutan, serta edukasi dan partisipasi masyarakat.
7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan, khususnya melalui pengelolaan retribusi parkir (Tepi Jalan Umum/TJU dan Tempat Khusus Parkir/TKP) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
8. Kesiapan menghadapi dinamika regional dan global, termasuk perkembangan transportasi cerdas (smart mobility), integrasi

transportasi antarwilayah (DIY–Jateng), dan tuntutan standardisasi pelayanan transportasi perkotaan yang berdaya saing.

TABEL 2. 8 TEKNIS MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sistem transportasi perkotaan dan konektivitas wilayah	Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, polusi udara	Belum optimalnya transportasi publik	Tren pengurangan emisi karbon & energi hijau	Program percepatan transportasi ramah lingkungan & energi bersih	Integrasi transportasi antarwilayah & kebutuhan aksesibilitas publik	Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas berkelanjutan
Lokasi strategis sebagai kota wisata dan budaya dengan arus kunjungan tinggi	Belum optimalnya transportasi publik, rendahnya penggunaan angkutan umum, serta tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang	Peningkatan emisi dan pencemaran udara akibat pertumbuhan kendaraan bermotor; penurunan kualitas udara dan kesehatan	SDGs sektor transportasi berkelanjutan (*green mobility*)	RPJMN 2025–2029, pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas, program	Rencana transportasi perkotaan DIY, konektivitas Jogja–Solo–Semarang	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan, efisien, dan mendukung pariwisata berkelanjutan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memicu kemacetan, pencemaran udara, dan penurunan kualitas lingkungan	masyarakat		"*Buy the Service*"		
Tersedianya jaringan jalan, terminal, stasiun kereta, dan halte Transjogja	Jumlah halte bus menurun, cakupan layanan Transjogja terbatas, dan terminal/simpul transportasi masih sedikit	Penurunan kualitas udara, kebisingan, dan risiko kecelakaan akibat peralihan ke kendaraan pribadi	Tren elektrifikasi transportasi	Integrasi angkutan umum perkotaan	Peningkatan interkoneksi moda transportasi DIY–Jateng	Penataan layanan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi dan adaptif
Infrastruktur jalan perkotaan	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan timpang,	Penurunan kualitas lingkungan perkotaan akibat dominasi	Mobilitas berkelanjutan	Program peningkatan kapasitas infrastruktur	Sinkronisasi jaringan jalan DIY–Jateng	Pengendalian pertumbuhan kendaraan dan peningkatan manajemen lalu lintas

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibanding penyediaan jalan → kepadatan meningkat	kendaraan bermotor		jalan perkotaan		perkotaan
Fasilitas pendukung transportasi (ATCS, terminal Giwangan, uji KIR kendaraan)	Jumlah kendaraan uji KIR menurun, kepatuhan rendah, berisiko menurunkan keselamatan transportasi	Keterbatasan pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan tidak laik jalan	Smart mobility	Transformasi digital transportasi perkotaan	Dukungan sistem informasi lalu lintas DIY	Manajemen lalu lintas berbasis teknologi, peningkatan keselamatan, dan kepatuhan regulasi

Berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah, permasalahan pembangunan, isu KLHS, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menghadapi sejumlah tantangan strategis pada periode 2025–2029. Isu-isu tersebut terutama berkaitan dengan tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, belum optimalnya transportasi publik, keterbatasan simpul transportasi, serta semakin timpangnya pertumbuhan kendaraan bermotor dibandingkan kapasitas jaringan jalan.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan nasional menuju transportasi berkelanjutan, tuntutan integrasi moda transportasi antarwilayah, serta penerapan teknologi digital pada manajemen lalu lintas menuntut Dishub untuk melakukan penyesuaian dan inovasi. Selain itu, aspek keselamatan lalu lintas dan kepatuhan terhadap uji KIR juga menjadi perhatian penting karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, isu strategis yang diidentifikasi dalam Tabel 2.8 menegaskan arah prioritas Dishub ke depan, yaitu membangun sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan, efisien, aman, berbasis teknologi, serta mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Bab III Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan perhubungan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran ini mengacu pada arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, serta memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta dalam RPJMD 2025–2029 adalah "*Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban*". Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi pembangunan, di mana Dinas Perhubungan berperan langsung dalam mendukung *Misi ke-4: Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*.

Sebagai turunan dari visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perhubungan menetapkan Visi Perangkat Daerah: "Transportasi Berkelanjutan, Mobilitas Berkeadaban."

Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk menghadirkan layanan transportasi perkotaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keselamatan, ketertiban, keberlanjutan lingkungan, serta etika berlalu lintas.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perhubungan merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan perparkiran.

Visi dan misi Dinas Perhubungan tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra 2025–2029. Dengan demikian, arah pembangunan transportasi di Kota Yogyakarta akan selaras dengan RPJMD, konsisten dengan kebijakan nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, tertib, lancar, ramah lingkungan, dan berkeadaban.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan 2025–2029 ditetapkan dengan mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana”. Tujuan ini juga selaras dengan visi Dinas Perhubungan “Transportasi Berkelanjutan, Mobilitas Berkeadaban” yang menekankan pada terciptanya sistem transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting, evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, serta hasil perumusan pohon kinerja, maka ditetapkan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan 2025–2029 sebagai berikut:

“Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan”.

Tujuan ini menekankan pada outcome jangka menengah berupa meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui aspek keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas, ketertiban perparkiran, maupun dukungan terhadap transportasi yang ramah lingkungan.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan”, Dinas Perhubungan menetapkan sasaran strategis yang lebih operasional, terukur, dan relevan dengan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Sasaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, evaluasi capaian lima tahun terakhir, serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan 2025–2029 adalah: “Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta.”

Sasaran ini dijabarkan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut.

TABEL 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	25,003 km/jam	25,004 km/jam	25,005 km/jam	25,006 km/jam	25,007 km/jam	25,008 km/jam	-
			Jumlah daerah rawan kecelakaan	8 lokasi	6 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	-

Tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada periode 2025–2029 adalah *"*meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan*."* Tujuan ini merupakan turunan dari sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD, khususnya peningkatan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, ramah lingkungan, berketahanan iklim, dan tangguh terhadap bencana. Kepuasan masyarakat dijadikan tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan, karena kualitas layanan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman akan langsung dirasakan oleh warga kota.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah *"*meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta*."* Sasaran ini menekankan pentingnya penyelenggaraan transportasi yang tidak hanya memperhatikan kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga mengedepankan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan adanya sasaran ini, Dishub diarahkan untuk menyusun program dan kegiatan yang mampu mengurangi kemacetan sekaligus menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Indikator tujuan yang digunakan adalah kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam). Indikator ini dipilih karena secara obyektif merepresentasikan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan perkotaan. Target kinerja menunjukkan peningkatan bertahap dari 25,003 km/jam pada tahun 2025 hingga 25,008 km/jam pada tahun 2030. Kenaikan yang relatif kecil ini justru menunjukkan kondisi yang realistis, mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor cukup tinggi sementara ruang jalan di Kota Yogyakarta terbatas. Dengan demikian, menjaga agar kecepatan rata-rata tetap stabil dan bahkan sedikit meningkat sudah menjadi prestasi tersendiri dalam upaya menjaga kelancaran mobilitas perkotaan. Indikator tujuan ini mencerminkan aspek outcome, yaitu dampak yang langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

Sedangkan indikator sasaran yang digunakan adalah jumlah daerah rawan kecelakaan. Indikator ini mengukur aspek keselamatan lalu lintas secara langsung dan lebih bersifat operasional. Target penurunan yang signifikan ditetapkan dari 8 lokasi pada tahun 2025 menjadi 0 lokasi pada tahun 2029 dan 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program keselamatan jalan yang lebih komprehensif, mulai dari audit keselamatan, rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas keselamatan (rambu, marka, APILL), hingga peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Indikator sasaran ini lebih menekankan pada output yang dihasilkan dari program dan intervensi Dishub dalam rangka mengurangi potensi kecelakaan.

Dengan adanya kombinasi antara indikator tujuan dan indikator sasaran, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran lalu lintas (*service performance*) dan keselamatan pengguna jalan (*safety performance*). Indikator tujuan memberikan gambaran makro mengenai kepuasan masyarakat melalui kelancaran arus lalu lintas, sedangkan indikator sasaran berfokus pada aspek mikro yang lebih terukur dan aplikatif, yaitu penurunan jumlah titik rawan kecelakaan. Pencapaian kedua indikator ini secara terpadu akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan transportasi perkotaan, sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Yogyakarta 2025–2029 yang berkelanjutan, aman, dan inklusif.

3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan” serta sasaran “Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta”, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menetapkan strategi pembangunan sektor perhubungan yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan visi perangkat daerah. Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis permasalahan, isu strategis, serta potensi yang dimiliki daerah.

Strategi Dinas Perhubungan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen lalu lintas perkotaan melalui pengembangan sistem transportasi cerdas (*intelligent transport system*), rekayasa lalu lintas yang adaptif, serta pengendalian dampak lalu lintas.
2. Peningkatan keselamatan transportasi jalan dengan memperkuat program edukasi dan budaya tertib lalu lintas, manajemen keselamatan jalan, serta pengurangan titik rawan kecelakaan.
3. Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan yang efisien, terintegrasi, terjangkau, dan ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan moda transportasi rendah emisi (bus listrik, shuttle ramah lingkungan).
4. Pengelolaan perparkiran yang tertib dan berkeadilan, melalui penataan parkir tepi jalan, optimalisasi tempat khusus parkir, serta digitalisasi sistem parkir.
5. Peningkatan kualitas pelayanan uji kendaraan bermotor (KIR) dengan modernisasi sarana prasarana, digitalisasi layanan, dan percepatan waktu pelayanan.

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perhubungan (*e-transport service*) untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM perhubungan melalui peningkatan kompetensi aparatur, tata kelola berbasis kinerja, serta koordinasi lintas sektor (kepolisian, BUMD transportasi, swasta, dan masyarakat).
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan strategis dalam mendukung tertib lalu lintas, pengembangan transportasi berkelanjutan, dan inovasi pelayanan transportasi.

Dengan strategi tersebut, Dinas Perhubungan diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, lancar, dan ramah lingkungan, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi.

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, diperlukan penahapan pembangunan yang sistematis dan berkesinambungan. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, penahapan juga menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan kebijakan hingga tahun 2030, sesuai dengan arah RPJPD dan RPJMD Kota Yogyakarta.

Penahapan Renstra Dishub dibagi ke dalam lima tahap, mulai tahun 2026 hingga 2030. Pada tahun ini tahun 2025 dimulai dengan penyusunan regulasi, penyiapan basis data transportasi, penguatan kelembagaan, dan perencanaan program prioritas (ITS, parkir digital, manajemen bus wisata). Masing-masing tahap memuat fokus pembangunan yang berbeda, mulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan, implementasi awal, perluasan cakupan, hingga konsolidasi dan keberlanjutan.

TABEL 3. 2 PENAHAPAN RENSTRA

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Implementasi awal: uji coba manajemen lalu lintas berbasis ITS,	Perluasan implementasi: perluasan manajemen lalu lintas bus	Optimalisasi: integrasi ITS dengan sistem pemantauan	Penguatan kualitas layanan: evaluasi menyeluruh	Konsolidasi & keberlanjutan: konsolidasi sistem transportasi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pengembangan sistem pembayaran parkir QRIS di titik strategis, serta pilot project layanan uji kendaraan *drive thru*	pariwisata, peningkatan keselamatan berlalu lintas dengan penanganan titik rawan kecelakaan, serta digitalisasi layanan transportasi publik.	lalu lintas, perluasan QRIS parkir ke seluruh kawasan utama, serta penguatan SDM pengelola transportasi.	capaian program, peningkatan standar pelayanan minimal transportasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam tertib lalu lintas.	cerdas, penguatan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan, serta memastikan keberlanjutan inovasi layanan ramah lingkungan.

Dengan adanya penahapan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki peta jalan yang jelas dalam mewujudkan transportasi perkotaan yang aman, tertib, lancar, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Setiap tahap diharapkan dapat menghasilkan capaian nyata yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, penahapan ini juga memastikan konsistensi kebijakan transportasi hingga tahun 2030 sehingga sejalan dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta dan arah kebijakan nasional di bidang perhubungan.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan sektor perhubungan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Berdasarkan analisis permasalahan, isu strategis, serta arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan menetapkan enam arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Perkotaan berbasis ITS. Fokus pada penerapan sistem transportasi cerdas untuk mendukung manajemen

kebutuhan lalu lintas (*Traffic Demand Management*), pengaturan pergerakan kendaraan, serta pengendalian arus transportasi secara real time.

2. Menyusun Tindak Lanjut Dampak Exit Tol.
   Mengantisipasi dan menangani dampak operasionalisasi jalan tol terhadap lalu lintas perkotaan, khususnya potensi peningkatan volume kendaraan di pusat kota.
3. Manajemen Lalu Lintas Bus Pariwisata.
   Melakukan pengaturan lalu lintas bus pariwisata melalui penentuan rute, lokasi parkir, serta integrasi dengan destinasi wisata untuk menjaga kelancaran, kenyamanan, dan daya tarik wisata di Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Pengguna Jalan.
   Memperkuat program keselamatan jalan melalui edukasi, kampanye tertib lalu lintas, penanganan titik rawan kecelakaan, serta peningkatan pengawasan keselamatan angkutan umum.
5. Penerapan Teknologi Digital Pembayaran Parkir melalui QRIS.
   Mengembangkan sistem pembayaran parkir digital berbasis QRIS untuk mewujudkan layanan parkir yang transparan, akuntabel, mudah diakses, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
6. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).
   Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan uji kendaraan bermotor dengan inovasi layanan *drive thru*, sehingga mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi potensi antrean.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan transportasi perkotaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan 2025–2029, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan juga disusun dengan memperhatikan tantangan aktual di bidang transportasi, termasuk dinamika lalu lintas perkotaan, kebutuhan manajemen parkir, peningkatan keselamatan berlalu lintas, digitalisasi pelayanan publik, serta penyelenggaraan transportasi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi pedoman strategis bagi program dan kegiatan Dishub selama lima tahun ke depan.

TABEL 3. 3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA 2025–2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Peningkatan kinerja ruas jalan (VC Ratio dan kecepatan rata-rata kendaraan).	Pengelolaan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, penerapan teknologi ATCS	
2.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur angkutan umum	Peningkatan layanan dan infrastruktur angkutan umum (halte, terminal, integrasi moda, akses difabel)	
3.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Peningkatan persentase kendaraan laik jalan	Uji berkala kendaraan bermotor (KIR), pengawasan teknis kendaraan angkutan umum/barang, digitalisasi layanan KIR	
4.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Peningkatan persentase kepatuhan lalu lintas	Sosialisasi, edukasi keselamatan, penertiban, dan penegakan aturan lalu lintas bersama stakeholder	
5.	Meningkatnya kelancaran dan	Peningkatan persentase	Penataan parkir on-street & off-street,	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	keselamatan lalu lintas	pendukung perparkiran resmi dan sesuai standar	penegakan parkir liar, pengembangan QRISS parkir	

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 telah dirumuskan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada operasionalisasi NSPK. Seluruh sasaran yang ditetapkan, yaitu Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas, telah diterjemahkan secara aplikatif ke dalam langkah-langkah kebijakan Dinas Perhubungan yang mencakup peningkatan kinerja lalu lintas, pengembangan infrastruktur angkutan umum, peningkatan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas, pemenuhan standar kelayakan kendaraan, serta penataan sistem perparkiran.

Penyusunan arah kebijakan ini menunjukkan keterpaduan antara kebijakan makro daerah dengan strategi teknis operasional di tingkat perangkat daerah, sehingga dapat menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan transportasi perkotaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Bab IV ini memuat arah operasionalisasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 melalui perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan pendekatan *cascading* dari pohon kinerja, sehingga setiap outcome dan output memiliki keterhubungan yang jelas dengan indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

Dalam penyusunannya, program, kegiatan, dan subkegiatan telah diselaraskan dengan nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran dapat lebih terintegrasi, konsisten, dan akuntabel.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, khususnya pada misi pembangunan ke-2, yaitu *Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari*. Selain itu, beberapa subkegiatan dirancang secara khusus untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, seperti pengelolaan lalu lintas bus pariwisata, peningkatan keselamatan berlalu lintas, digitalisasi perparkiran dan pembayaran retribusi melalui QRIS, serta layanan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem *drive thru*.

Renstra Dinas Perhubungan ini juga menetapkan target hingga tahun 2030. Penetapan target pada tahun terakhir tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2030. Dengan demikian, arah pembangunan transportasi di Kota Yogyakarta dapat berkesinambungan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029. Program-program tersebut disusun mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029, pohon kinerja Dinas Perhubungan, serta klasifikasi dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Klasifikasi dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perhubungan seperti ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut.

TABEL 4. 1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN BESERTA PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2030

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		DINAS PERHUBUNGAN			Rp26.174.571.722		Rp27.483.300.308		Rp28.857.465.324		Rp30.300.338.590		Rp31.815.355.519
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp26.174.571.722		Rp27.483.300.308		Rp28.857.465.324		Rp30.300.338.590		Rp31.815.355.519
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp26.174.571.722		Rp27.483.300.308		Rp28.857.465.324		Rp30.300.338.590		Rp31.815.355.519
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Dinas Perhubungan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Nilai SPIP Dinas Perhubungan	80,01 Nilai A (83,86-85,00) Nilai Optimum (3,49-4) Nilai	Rp12.293.525.324		Rp12.908.201.590		Rp13.553.611.670		Rp14.231.292.253		Rp14.942.856.866
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp99.546.500		Rp104.523.825		Rp109.750.016		Rp115.237.517		Rp120.999.393
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp3.660.000		Rp3.843.000		Rp4.035.150		Rp4.236.908		Rp4.448.753
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	Rp3.377.500		Rp3.546.375		Rp3.723.694		Rp3.909.878		Rp4.105.372
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp3.385.000		Rp3.554.250		Rp3.731.963		Rp3.918.561		Rp4.114.489

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp3.110.000		Rp3.265.500		Rp3.428.775		Rp3.600.214		Rp3.780.224
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp3.110.000		Rp3.265.500		Rp3.428.775		Rp3.600.214		Rp3.780.224
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp73.044.000		Rp76.696.200		Rp80.531.010	Rp0	Rp84.557.561		Rp88.785.439
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp9.860.000		Rp10.353.000		Rp10.870.650		Rp11.414.183		Rp11.984.892
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp9.300.297.734		Rp9.765.312.621		Rp10.253.578.252		Rp10.766.257.164		Rp11.304.570.023
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bula	Rp9.291.370.234		Rp9.755.938.746		Rp10.243.735.683		Rp10.755.922.467		Rp11.293.718.590
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujuan/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp327.500		Rp343.875		Rp361.069		Rp379.122		Rp398.078

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp295.000		Rp309.750		Rp325.238		Rp341.499		Rp358.574
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp500.000		Rp525.000		Rp551.250		Rp578.813		Rp607.753
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1 Dokumen	Rp795.000		Rp834.750		Rp876.488		Rp920.312		Rp966.327
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp6.860.000		Rp7.203.000		Rp7.563.150		Rp7.941.308		Rp8.338.373
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp150.000		Rp157.500		Rp165.375		Rp173.644		Rp182.326
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp2.900.000		Rp3.045.000		Rp3.197.250		Rp3.357.113		Rp3.524.968

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp580.000		Rp609.000		Rp639.450		Rp671.423		Rp704.994
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp680.000		Rp714.000		Rp749.700		Rp787.185		Rp826.544
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Rp680.000		Rp714.000		Rp749.700		Rp787.185		Rp826.544
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Rp450.000		Rp472.500		Rp496.125		Rp520.931		Rp546.978
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	Rp255.000		Rp267.750		Rp281.138		Rp295.194		Rp309.954
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Rp255.000		Rp267.750		Rp281.138		Rp295.194		Rp309.954
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp171.623.000		Rp180.204.150		Rp189.214.358		Rp198.675.075		Rp208.608.829
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	117 Paket	Rp170.703.000		Rp179.238.150		Rp188.200.058		Rp197.610.060		Rp207.490.563

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp920.000		Rp966.000		Rp1.014.300		Rp1.065.015		Rp1.118.266
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp392.640.590		Rp412.272.620		Rp432.886.250		Rp454.530.563		Rp477.257.091
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp14.601.150		Rp15.331.208		Rp16.097.768		Rp16.902.656		Rp17.747.789
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	Rp107.159.440		Rp112.517.412		Rp118.143.283		Rp124.050.447		Rp130.252.969
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp11.891.000		Rp12.485.550		Rp13.109.828		Rp13.765.319		Rp14.453.585
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp83.300.000		Rp87.465.000		Rp91.838.250		Rp96.430.163		Rp101.251.671
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp7.800.000		Rp8.190.000		Rp8.599.500		Rp9.029.475		Rp9.480.949

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp167.889.000		Rp176.283.450		Rp185.097.623		Rp194.352.504		Rp204.070.129
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp65.550.000		Rp68.827.500		Rp72.268.875		Rp75.882.319		Rp79.676.435
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Rp18.000.000		Rp18.900.000		Rp19.845.000		Rp20.837.250		Rp21.879.113
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp47.500.000		Rp49.875.000		Rp52.368.750		Rp54.987.188		Rp57.736.547
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.440.280.000		Rp1.512.294.000		Rp1.587.908.700		Rp1.667.304.135		Rp1.750.669.342
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp4.600.000		Rp4.830.000		Rp5.071.500		Rp5.325.075		Rp5.591.329
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp579.800.000		Rp608.790.000		Rp639.229.500		Rp671.190.975		Rp704.750.524

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp855.880.000		Rp898.674.000		Rp943.607.700		Rp990.788.085		Rp1.040.327.489
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp820.687.500		Rp861.721.875		Rp904.807.969		Rp950.048.367		Rp997.550.786
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp26.540.000		Rp27.867.000		Rp29.260.350		Rp30.723.368		Rp32.259.536
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	Rp504.617.500		Rp529.848.375		Rp556.340.794		Rp584.157.833		Rp613.365.725
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	Rp91.530.000		Rp96.106.500		Rp100.911.825		Rp105.957.416		Rp111.255.287
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp198.000.000		Rp207.900.000		Rp218.295.000		Rp229.209.750		Rp240.670.238

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2	**2.15.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) Persentase kepatuhan lalu lintas Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase kendaraan laik jalan Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart	0,748 Nilai 65 % 76,03 % 87,66 % 93,27 %	Rp13.881.046.398		Rp14.575.098.718		Rp15.303.853.654		Rp16.069.046.336		Rp16.872.498.653
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Rp2.815.204.800		Rp2.955.965.040		Rp3.103.763.292		Rp3.258.951.457		Rp3.421.899.029
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	Rp696.500.000		Rp731.325.000		Rp767.891.250		Rp806.285.813		Rp846.600.103

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	161 Unit	Rp2.118.704.800		Rp2.224.640.040		Rp2.335.872.042		Rp2.452.665.644		Rp2.575.298.926
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			Rp7.564.934.698		Rp7.943.181.433		Rp8.340.340.505		Rp8.757.357.530		Rp9.195.225.406
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	Rp628.188.000		Rp659.597.400		Rp692.577.270		Rp727.206.134		Rp763.566.440
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Rp6.936.746.698		Rp7.283.584.033		Rp7.647.763.235		Rp8.030.151.396		Rp8.431.658.966
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp2.384.754.000		Rp2.503.991.700		Rp2.629.191.285		Rp2.760.650.849		Rp2.898.683.392

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	Rp1.836.308.000		Rp1.928.123.400		Rp2.024.529.570		Rp2.125.756.049		Rp2.232.043.851
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp66.640.000		Rp69.972.000		Rp73.470.600		Rp77.144.130		Rp81.001.337
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk	3 Laporan	Rp251.670.000		Rp264.253.500		Rp277.466.175		Rp291.339.484		Rp305.906.458
	2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas											
			Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	2 Unit	Rp230.136.000		Rp241.642.800		Rp253.724.940		Rp266.411.187		Rp279.731.746
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			Rp289.160.000		Rp303.618.000		Rp318.798.900		Rp334.738.845		Rp351.475.787
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25 Laporan	Rp226.920.000		Rp238.266.000		Rp250.179.300		Rp262.688.265		Rp275.822.678

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin											
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	24 Laporan	Rp62.240.000		Rp65.352.000		Rp68.619.600		Rp72.050.580		Rp75.653.109
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Rp555.674.500		Rp583.458.225		Rp612.631.136		Rp643.262.693		Rp675.425.828
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp555.674.500		Rp583.458.225		Rp612.631.136		Rp643.262.693		Rp675.425.828
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp271.318.400		Rp284.884.320		Rp299.128.536		Rp314.084.963		Rp329.789.211
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada											
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit	Rp271.318.400		Rp284.884.320		Rp299.128.536		Rp314.084.963		Rp329.789.211

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			Rp524.514.000		Rp550.739.700		Rp578.276.685		Rp607.190.519		Rp637.550.045
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp524.514.000		Rp550.739.700		Rp578.276.685		Rp607.190.519		Rp637.550.045
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp524.514.001		Rp550.739.701		Rp578.276.686		Rp607.190.520		Rp637.550.046
1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) Persentase kepatuhan lalu lintas Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase kendaraan laik jalan Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang	0,748 Nilai 65,00 % 76,03 % 87,66 % 93,27 %	Rp524.514.000		Rp550.739.700		Rp578.276.685		Rp607.190.519		Rp637.550.045
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rp524.514.000		Rp550.739.700		Rp578.276.685		Rp607.190.519		Rp637.550.045
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	2 Unit	Rp221.554.000		Rp232.631.700		Rp244.263.285		Rp256.476.449		Rp269.300.272
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	Rp900.000		Rp945.000		Rp992.250		Rp1.041.863		Rp1.093.956

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Dokumen	Rp75.000.000		Rp78.750.000		Rp82.687.500		Rp86.821.875		Rp91.162.969
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp1.800.000		Rp1.890.000		Rp1.984.500		Rp2.083.725		Rp2.187.911
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Rp218.000.000		Rp228.900.000		Rp240.345.000		Rp252.362.250		Rp264.980.363
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Rp7.260.000		Rp7.623.000		Rp8.004.150		Rp8.404.358		Rp8.824.575

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini menggambarkan outcome strategis yang langsung mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan Renstra, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029.

Setiap IKU ditetapkan berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi juga memberikan arah bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan.

Melalui IKU, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dipantau secara sistematis, sehingga setiap progres kinerja dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dilakukan tindak lanjut secara tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 4.2 berikut menyajikan daftar IKU Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta periode 2025–2029, beserta target pencapaian pada setiap tahunnya, yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi Renstra.

TABEL 4. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Perkotaan	Nilai	BAIK (81,853)	BAIK (81,000)	BAIK (81,500)	BAIK (82,000)	BAIK (82,500)	BAIK (83,000)	BAIK (83,500)	-
2.	Indeks Rata – rata Kecepatan Kendaraan	Km/jam	26,20	23,01	23,02	23,03	23,04	23,05	23,06	-
3.	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	Lokasi	10	8	6	4	2	0	0	-

4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan utama yang ditetapkan secara nasional untuk menilai capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sesuai dengan pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), setiap urusan pemerintahan memiliki IKK yang menjadi standar kinerja bagi perangkat daerah. Dalam konteks urusan perhubungan, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan dua IKK utama yaitu rasio konektivitas kabupaten/kota dan kinerja lalu lintas kabupaten/kota (*Volume to Capacity Ratio/VC Ratio*).

Rasio konektivitas kabupaten/kota menggambarkan tingkat keterhubungan suatu daerah dengan wilayah sekitarnya melalui jaringan transportasi darat. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik aksesibilitas masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Konektivitas yang optimal merupakan prasyarat bagi terwujudnya daya saing daerah dan integrasi wilayah. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta yang berperan sebagai pusat kegiatan wilayah di DIY dan sekitarnya dituntut menjaga konektivitas yang stabil dan efektif dengan kabupaten/kota sekitar.

Sementara itu, kinerja lalu lintas kabupaten/kota diukur melalui rasio volume terhadap kapasitas (V/C Ratio), yang menunjukkan tingkat pelayanan suatu ruas jalan. Menurut teori transportasi, nilai V/C Ratio < 0,75 menunjukkan kondisi lalu lintas masih lancar, sedangkan nilai di atas 0,85 menandakan terjadinya kepadatan yang signifikan. Dengan demikian, indikator ini menjadi penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan lalu lintas perkotaan, termasuk upaya pengurangan kemacetan, peningkatan kapasitas jalan, serta pengembangan moda transportasi publik sebagai alternatif kendaraan pribadi.

Dengan penetapan kedua IKK tersebut, target kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan kelancaran lalu lintas dalam kota.

TABEL 4. 3 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Indeks	1	1	1	1	1	1
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio)	Rasio	0,50	0,749	0,748	0,747	0,746	0,745

Target kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3 di atas memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Yogyakarta selama periode 2025–2029. Pada indikator rasio konektivitas kabupaten/kota, target ditetapkan tetap 1 sepanjang periode, yang menandakan bahwa konektivitas wilayah Kota Yogyakarta dengan kabupaten/kota di sekitarnya sudah berada pada tingkat optimal. Oleh karena itu, fokus kebijakan Dinas Perhubungan bukan lagi sekadar memperluas jaringan, tetapi menjaga keberlanjutan konektivitas melalui integrasi layanan transportasi lintas wilayah, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar, serta pengembangan moda angkutan umum regional. Stabilitas indikator ini diharapkan mampu menjaga posisi Kota Yogyakarta sebagai simpul utama pergerakan manusia dan barang di wilayah DIY.

Pada indikator kedua, yaitu kinerja lalu lintas kabupaten/kota (*V/C Ratio*), target menunjukkan kecenderungan penurunan dari 0,749 pada tahun 2025 menjadi 0,745 pada tahun 2029. Penurunan ini berarti kapasitas pelayanan jalan diproyeksikan semakin baik, meskipun pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta perlu melaksanakan strategi manajemen lalu lintas yang lebih efektif, termasuk optimalisasi *Area Traffic Control System* (ATCS), penataan parkir, pengendalian titik kemacetan, serta sosialisasi penggunaan transportasi publik. Selain itu, indikator ini juga mengandung makna penting bagi keselamatan dan efisiensi mobilitas masyarakat, sebab kinerja lalu lintas yang baik akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga kota.

Secara keseluruhan, kedua indikator kinerja kunci ini mencerminkan keseimbangan antara aspek makro (konektivitas wilayah) dan aspek mikro (kelancaran lalu lintas perkotaan). Dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga mendukung integrasi wilayah serta pembangunan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika isu strategis transportasi perkotaan dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, sehingga dokumen ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, tertib, lancar, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Renstra ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator program (outcome), dan indikator kegiatan (output). Seluruh indikator tersebut menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan. Selanjutnya, dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman implementasi tahunan.

Keberhasilan pencapaian target Renstra ini sangat ditentukan oleh konsistensi kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, serta sinergi dengan pemangku kepentingan lintas sektor. Untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, akan dilakukan mekanisme monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian secara berkala, yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dengan demikian, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman strategis, tetapi juga instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan. Melalui implementasi Renstra ini diharapkan Dinas Perhubungan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian sasaran RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta yang nyaman, berkelanjutan, dan berkeadaban demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

POHON KINERJA & CASCADING DINAS PERHUBUNGAN 2025 - 2030

SASARAN DAERAH

Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang mantap, berkelanjutan dan tahan terhadap bencana

TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan

Indikator :
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Perkotaan

SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

ULTIMATE OUTCAME

1. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Indikator:
1. Indeks rata-rata kecepatan kendaraan

2025	2026	2027	2028	2029	2030
23,01 km/jam	23,02 km/jam	23,03 km/jam	23,04 km/jam	23,05 km/jam	23,06 km/jam

2. Jumlah daerah rawan kecelakaan

2025	2026	2027	2028	2029	2030
8 lokasi	6 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	0 lokasi	0 lokasi

SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

ULTIMATE OUTCAME

2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perhubungan yang Baik dan Adaptif

Indikator:
1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

2025	2026	2027	2028	2029	2030
A (84,99-90)	A (85,00-90)	A (85,01-90)	A (85,02-90)	A (85,03-90)	A (85,04-90)

INITIAL OUTCAME

CSF 6 :
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan

Indikator :
IK : - Nilai SAKIP Dinas Perhubungan
- Nilai SPIP Dinas Perhubungan
- Nilai IKM Dinas Perhubungan

INTERMEDIATE OUTCAME

CSF 1 :
Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan

Indikator:
Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)

INTERMEDIATE OUTCAME

CSF 2 : Meningkatnya aksesibilitas angkutan umum

Indikator:
Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum

INITIAL OUTCAME

CSF 3 : Meningkatnya tata kelola perparkiran

Indikator:
Persentase pendukung penyelenggaraan perparkiran (saprpas parkir dan juru parkir serta petugas parkir) yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart

INITIAL OUTCAME

CSF 5 :
Meningkatnya kepatuhan lalu lintas

Indikator :
Persentase kepatuhan lalu lintas

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam sistem transportasi

Indikator:
Persentase persimpangan yang menggunakan sistem area traffic control system (ATCS)
Rumus : (Jml ATCS yg terpasang/Jml keseluruhan simpang) x 100%

OUTPUT

Terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas pada simpang yang ber-ATCS

Indikator:
Jumlah simpang ber ATCS yang diketoa melalui CCRoom

2025	2026	2027
33	39	37
2028	2029	2030
39	41	43

OUTPUT

Terlaksananya pengadaan ATCS

Indikator:
Jumlah ATCS yang diadakan

2025	2026	2027
33	35	37
2028	2029	2030
39	41	43

Cross cutting ketugasan MRLL :
1. Kominfo
2. Kemantren-se-Kota Yogyakarta 3. Dishub DIY

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan yang berkualitas baik

Indikator:
Persentase fasilitas perlengkapan jln-dalam kondisi baik
Rumus : (Jml fasilitas perlengkapan jln yang terpelihara/Jlh fasilitas perlengkapan jalan yang ada) x 100%

OUTPUT

Terlaksananya pemasangan dan pemeliharaan traffic light

Indikator:
Jumlah traffic light terpasang dan terpelihara

2025	2026	2027
50	50	60
2028	2029	2030
50	50	50

OUTPUT

Terlaksananya pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Indikator:
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dan terpelihara

2025	2026	2027
100	100	100
2028	2029	2030
100	100	100

Cross cutting ketugasan Traffic Light dan Rambu, Marka :
1. DPUPKP
2. Dishub DIY

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya pelayanan rekomendasi teknis andalalin

Indikator : Persentase pelayanan rekomendasi sesuai SOP
Rumus : (Permohonan yang sesuai SOP/jml total permohonan yang masuk)x100%

OUTPUT

Terlaksananya pelayanan rekomendasi teknis dokumen andalalin

Indikator:
Jumlah rekomendasi yang dilayani

2025	2026	2027
20	20	20
2028	2029	2030
20	20	20

Cross cutting ketugasan Rekomendasi Andalalin :
1. DPTMSP
2. DPUPKP
3. Kepolisian

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya ketersediaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) yang layak dan terjangkau

Indikator:
Persentase tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum yang terpelihara dengan baik. **Rumus** : (Jml TPKPU yang terpelihara/Jml TPKPU yang ada) x 100%

OUTPUT

Tersedianya tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum

Indikator:
Jumlah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum

2025	2026	2027
4	5	6
2028	2029	2030
7	8	9

Cross cutting ketugasan TPKPU :
1. Dishub DIY

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotor

Indikator:
Persentase penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotor
Rumus : (Jml yang dilaksanakan/Jml yg direncanakan) x 100%

OUTPUT

Tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum kendaraan tidak bermotor

Indikator:
Jumlah sarana dan prasarana angkutan umum kendaraan tidak bermotor

2025	2026	2027
1108	560	813
2028	2029	2030
1016	519	722

OUTPUT

Terlaksananya pembinaan terhadap operator angkutan umum kendaraan tidak bermotor

Indikator:
Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan

2025	2026	2027
5 kali	5 kali	5 kali
2028	2029	2030
5 kali	5 kali	5 kali

Cross cutting ketugasan Pembinaan KTB :
1. Dishub DIY 2. Pagayuban Andong
3. Komunitas Becak

INITIAL OUTCAME

Tersedianya sistem sarpras parkir yang efektif

Indikator:
Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baik
Rumus : (jml sarpras parkir yang berkondisi baik/jml sarpras parkir yang terpasang) x 100%

OUTPUT

Terpeliharanya sarana prasarana perparkiran

Indikator: Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

2025	2026	2027
380	400	420
2028	2029	2030
440	460	476

INITIAL OUTCAME

Terwujudnya pengelolaan juru parkir yang efektif

Indikator: Persentase juru parkir yang tertib **Rumus :** (jml juru resmi yang tertib/jml juru yang resmi) x 100%

OUTPUT

Terlaksananya pembinaan terhadap juru parkir yang resmi

Indikator:
Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan

2025	2026	2027
1000	1000	1100
2028	2029	2030
1150	1200	1200

Cross cutting ketugasan Pembinaan Juki :
1. Juru Parkir
2. Pengelola Tempat Khusus Parkir (TKP)
3. Denpom AD, AL, AU

INITIAL OUTCAME

Terlaksananya pelayanan penguijan berkala kendaraan bermotor yang efektif

Indikator:
Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji
(Jml kendaraan yang lulus uji/jml kendaraan yang diuji) x 100%

OUTPUT

Terpeliharanya sarana dan prasarana penguijan berkala kendaraan bermotor

Indikator:
Jumlah sarana dan prasarana penguijan kendaraan bermotor yang terpelihara baik

2025	2026	2027
2 line/2unit	2 line/2unit	2 line/2unit
2028	2029	2030
2 line/2unit	2 line/2unit	2 line/2unit

OUTPUT

Tersedianya bukti lulus uji

Indikator:
Jumlah BLUe yang yang tersedia

2025	2026	2027
3000	3000	3000
2028	2029	2030
3000	3000	3000

OUTPUT

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor

Indikator:

2025	2026	2027
2	2	2
2028	2029	2030
2	2	2

Cross cutting ketugasan PKB :
1. Kemenhub
2. BPTD Kelas II DIY
3. Dishub DIY

INITIAL OUTCAME

Terlaksananya operasi terpadu penegakan hukum bidang Perhubungan

Indikator:
Persentase pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap ruas jalan yang efektif
Rumus : (Gakum yang terlaksana/Gakum yang direncankan) x 100%

OUTPUT

Terselenggaranya kegiatan patroli pengaturan lalu lintas

Indikator:
Jumlah kegiatan patroli pengaturan lalu lintas

2025	2026	2027
720kali	720kali	720kali
2028	2029	2030
720kali	720kali	720kali

Cross cutting ketugasan Gakum dan Patroli :
1. Satpol PP
2. Kepolisian
3. Dishub DIY 4. Polisi Militer 5. BPTD Kelas II DIY

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas

Indikator:
Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintas
Rumus : (Jumlah orang yang datang/Jumlah orang yang diundang) x 100%

OUTPUT

Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas pada siswa

Indikator:
Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan berlalu lintas

2025	2026	2027
1750	1790	2010
2028	2029	2030
2230	2540	2670

OUTPUT

Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas pada kelompok masyarakat

Indikator:
Jumlah orang dalam kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan berlalu lintas

2025	2026	2027
200	240	280
2028	2029	2030
320	360	400

Cross cutting ketugasan Sosialisasi Keselamatan :
1. Kemantren-se-Kota Yogyakarta
2. Kepolisian
3. Jasa Raharja
4. Dinas Pendidikan

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan

IK :
1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
2. Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perhubungan

OUTPUT

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaanaan perangkat daerah

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Cross cutting ketugasan
1. BPKAD
2. Bappeda
3. Diskominfosan
4. Bagian Administrasi & Pembangunan Setda
5. Bagian Organisasi Setda
6. Bagian Tata Pemerintahan Setda
7. Inspektorat

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan

IK :
Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan

OUTPUT

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Cross cutting ketugasan
1. BPKAD
2. Bagian Administrasi Pembangunan Setda
3. BKPSDM
4. Inspektorat
dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem da prosedur penatausahaan keuangan

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas Perhubungan

IK :
Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan

OUTPUT

Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
IK : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK :Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Mebel
IK : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Cross cutting ketugasan
BPKAD (Bidang Aset) selaku OPD pengampu tatalaksana barang dan aset Pemerintah Daerah

INITIAL OUTCAME

Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Perhubungannm

IK :
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan

OUTPUT

Terlaksananya Pengadaanm pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
IK : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan	Catatan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030		
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan	Indeks yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yang meliputi: (1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, (2) Manajemen Lalu Lintas dan APILL, (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (4) Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, (5) Penerbitan Surat Izin Juru Parkir & Pengelola TKP, serta (6) Pelayanan Taman Keselamatan Lalu Lintas. Survei ini dilakukan dengan				Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	BAIK (81,853)	BAIK (81,000)	BAIK (81,500)	BAIK (82,000)	BAIK (82,500)	BAIK (83,000)	BAIK (83,000)	BAIK (83,500)	FALSE	- Perlu dilengkapi terkait definisi operasional, kondisi awal, target, dan kondisi akhir - indikator kinerja berbeda dengan cascading
						Sumber Data:											
						Survey Indeks	Nilai	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK		
			1.1 Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Rata-rata kecepatan kendaraan	Ukuran yang menunjukkan tingkat kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan berdasarkan rata-rata kecepatan kendaraan bermotor pada seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta. Data diperoleh dari hasil pemantauan kecepatan kendaraan yang didapatkan dari survey updating kinerja lalu lintas secara periodik tahunan. Semakin tinggi rata-rata	Hasil Survey Updating Kinerja Lalu Lintas	km/jam	26,20	23,01	23,02	23,03	23,04	23,05	23,05	23,06	FALSE	Perlu dilengkapi terkait definisi operasional dan sumber data
						Sumber Data:											
						Hasil Survey	km/ja	26,20	23,01	23,02	23,03	23,04	23,05	23,05	23,06		
				Jumlah daerah rawan kecelakaan	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) adalah indikator yang menunjukkan jumlah lokasi di Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas tinggi. Penilaian dilakukan melalui kajian teknis oleh Dinas Perhubungan berdasarkan data kecelakaan, observasi lapangan, dan evaluasi kondisi infrastruktur. Dari kajian tersebut, ditetapkan 10 lokasi dengan skor risiko tertinggi sebagai prioritas intervensi. Lokasi ini menjadi sasaran penanganan melalui pemasangan rambu, perbaikan infrastruktur lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan. Indikator ini digunakan untuk mendukung peningkatan keselamatan dan lalu lintas, serta sebagai dasar	Hasil Analisis Tim Kerja Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas	lokasi	10	8	6	4	2	0	0	0	FALSE	1) Perlu dilengkapi terkait definisi operasional dan sumber data 2) indikator kinerja berbeda dengan cascading, yaitu "daerah aman kecelakaan"
						Sumber Data:											
						Hasil Analisis Tim Kerja Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas	lokasi	10	8	6	4	2	0	0	0		
			1.2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perhubungan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari evaluasi internal terhadap aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Nilai penilaian mencerminkan tingkat kematangan tata kelola organisasi dan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan pelayanan publik.	Penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	FALSE	1) Perlu dilengkapi terkait definisi operasional dan sumber data 2) sasaran OPD 1.2 belum tercantum dalam cascading
						Sumber Data:											
						Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A		

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan	Catatan
												2025	2026	2027	2028	2029				
1.1. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	1.1.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)	Kinerja ruas jalan perkotaan diukur dengan menggunakan indikator V/C Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas maksimum jalan (C) pada waktu tertentu. Nilai V/C Ratio digunakan untuk menilai tingkat kelancaran lalu lintas, di mana semakin rendah nilainya, maka semakin lancar arus lalu lintas.					Hasil Kajian Survey Updating Kinerja Jalan rutin diadakan setahun sekali	-	0,630	0,749	0,748	0,747	0,746	0,745	0,745	0,745	FALSE	- Mohon dilengkapi terkait definisi operasional. kondisi awal, target, kondisi akhir - program, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan **sudah sesuai cascading**
									Sumber Data :											
									Hasil Survey Updating Kinerja Jalan	-	0,630	0,749	0,748	0,747	0,746	0,745	0,745	0,745		
					1.1.1.1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam sistem transportasi	Persentase persimpangan yang menggunakan sistem area traffic control system (ATCS)	Persentase persimpangan yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS, yaitu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi yang memungkinkan pengaturan sinyal lalu lintas secara adaptif dan terpusat. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas pada simpang-	(Jumlah ATCS yang terpasang/Jml keseluruhan simpang) x 100%)	%	60	66	70	74	78	82	82	86	FALSE	- Mohon dilengkapi dengan defiisi operasional - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan **sudah sesuai cascading**
									Sumber Data :											
									Jumlah ATCS yang terpasang	unit	30	33	35	37	39	41	41	43		
									Jumlah Keseluruhan simpang	unit	50	50	50	50	50	50	50	50		
					1.1.1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan yang berkualitas baik	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman jalan) yang berada dalam kondisi baik, yaitu berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar teknis serta keselamatan. Indikator ini mencerminkan efektivitas	(Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara/Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada) x 100%	%	85,00	85,42	85,81	86,19	86,31	86,88	86,88	87,20	FALSE	- Mohon dilengkapi dengan definisi operasional, target, dan sumber data - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan sudah sesuai cascading
									Sumber Data :											
									Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	unit	2976	3076	3176	3276	3367	3476	3476	3576		
									Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	unit	3501	3601	3701	3801	3901	4001	4001	4101		
					1.1.1.3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan rekomendasi teknis andalalin	Persentase pelayanan rekomendasi sesuai SOP	Persentase permohonan rekomendasi analisis dampak lalu lintas yang diproses dan dilayani sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam SOP. Indikator ini mengukur kualitas dan konsistensi pelayanan teknis analisis dampak lalu lintas dalam mendukung pengelolaan lalu lintas.	(Permohonan yang sesuai SOP/Jumlah total permohonan yang masuk) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	- Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, dan sumber data - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan sudah sesuai cascading
									Sumber Data :											
									Jumlah Permohonan sesuai SOP	buah	30	31	32	33	34	35	35	35		
									Jumlah Permohonan yang masuk	buah	30	31	32	33	34	35	35	35		
		Meningkatnya aksesibilitas angkutan umum	Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum	Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum adalah ukuran yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana angkutan umum yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total infrastruktur yang tersedia. Sarana dan prasarana ini mencakup halte, terminal, rambu angkutan umum, tempat parkir khusus angkutan, dan fasilitas															FALSE	
									(Persentase TPKPU yang terpelihara + Persentase KTB berkondisi baik)/2	%	82,08	91,94	93,42	94,44	95,19	95,76	95,76	96,21	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, formula perhitungan, target, dan sumber data - formula perhitungan **berbeda dengan cascading**
									Sumber Data :											
									Persentase TPKPU yang terpelihara	unit	79,17	83,87	86,84	88,89	90,38	91,53	91,53	92,42		
									Persentase KTB berkondisi baik	unit	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					1.1.1.4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) yang layak dan terjangkau	Persentase tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum yang terpelihara dengan baik	Persentase ini mengukur seberapa besar bagian dari total TPKPU yang tersedia dalam kondisi terpelihara dengan baik, yaitu memenuhi kriteria kebersihan, kenyamanan, kelengkapan fasilitas dasar, keamanan, dan kejelasan informasi. TPKPU meliputi halte, terminal kecil, atau rambu titik pemberhentian lainnya yang digunakan angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.	(JumlahTPKPU yang terpelihara/Jumlah TPKPU yang ada) x 100%	%	79,17	83,87	86,84	88,89	90,38	91,53	91,53	92,42	FALSE	- Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, target, dan sumber data - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan sudah sesuai cascading - pada kegiatan ini, masih terdapat sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan formula perhitungan yang belum dituliskan (**sheet cascading O-Q, 11)**
									Sumber Data:											
									Jumlah TPKPU yang terpelihara	unit	19	26	33	40	47	54	54	61		
									Jumlah TPKPU yang ada	unit	24	31	38	45	52	59	59	66		
						Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotor	Persentase penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotor	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap moda transportasi tidak bermotor (seperti becak kayuh dan andong) dibandingkan dengan jumlah rencana kegiatan yang telah disusun. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, pemberian fasilitas, pengaturan operasional, atau sosialisasi kebijakan. Tujuannya	Jumlah pembinaan yang terlaksana/ Jumlah yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	- Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, target, dan sumber data

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan	Catatan
								adalah untuk meningkatkan	Sumber Data:											
								kapasitas, kualitas pelayanan, dan	Jumlah pembinaan yang terlaksana	kali	5	5	5	5	5	5	30	5		
								keberlanjutan moda transportasi	Jumlah yang direncanakan	kali	5	5	5	5	5	5	30	5		
		Meningkatnya tata kelola perparkiran	Persentase pendukung penyelenggaran an perparkiran yang terkelola secara resmi dan	Indikator ini mengukur tingkat keterkelolaan dan kelayakan sistem pendukung perparkiran, yang meliputi: a) Sarana dan prasarana perparkiran (seperti rambu parkir, marka, tempat parkir resmi, sistem pembayaran, dan fasilitas keselamatan) dalam					(Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baik+ Persentase juru parkir yang tertib)/2	%	91,35	92,21	93,27	93,93	94,55	95,50	95,50	96,00	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, target, dan sumber data - sasaran program, indikator kinerja, dan formula perhitungan **sesuai cascading**
									Sumber Data:											
									Persentase sarana prasarana	%	97,71	97,92	98,54	99,17	99,79	100,00	100,00	100,00		
									Persentase juru parkir yang tertib	%	85,00	86,50	88,00	88,70	89,30	91,00	91,00	92,00		
					1.1.1.5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya sistem sarpras parkir yang efektif	Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baik	Persentase ini menunjukkan proporsi fasilitas perparkiran yang terpasang dan berfungsi baik sesuai standar	(Jumlah sarpras parkir yang berkondisi	%	97,71	97,92	98,54	99,17	99,79	100,00	100,00	100,00	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Jumlah sarpras parkir yang berkondisi	unit	469	470	473	476	479	480	480	480		
									Jumlah sarpras parkir yang terpasang	unit	480	480	480	480	480	480	480	480		
						Terwujudnya pengelolaan juru parkir yang efektif	Persentase juru parkir yang tertib	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan juru parkir resmi dalam menjalankan tugas sesuai standar	(Jumlah jukir resmi yang tertib/ Jumlah	%	85,00	86,50	88,00	88,70	89,30	91,00	91,00	92,00	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Jumlah jukir resmi yang tertib	orang	850	865	880	887	893	910	910	920		
									Jumlah jukir yang resmi	orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
		Meningkatnya kendaraan laik jalan	Persentase kendaraan laik jalan	Rasio rata-rata antara (1) kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji, dan (2) angkutan					(Persentase kendaraan bermotor wajib	%	88,66	94,53	94,54	94,54	94,55	94,56	94,56	94,56	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Persentase kendaraan bermotor wajib	%	89,05	89,06	89,08	89,09	89,10	89,11	89,11	89,12		
									Persentase Penerbitan Tanda Nomor	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					1.1.1.6. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan pengujian berkala kendaraan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	Indikator ini mengukur Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang diuji.	(Jumlah kendaraan yang lulus uji/	%	89,05	89,06	89,08	89,09	89,10	89,11	89,11	89,12	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Jumlah kendaraan yang lulus uji	unit	7540	7541	7542	7543	7544	7545	7545	7546		
									Jumlah kendaraan yang diuji	unit	8467	8467	8467	8467	8467	8467	8467	8467		
					1.1.1.4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Terlaksananya pemastian pelayanan angkutan umum kendaraan tidak	Persentase Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat	Indikator ini mengukur digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam proses legalisasi dan	(Jumlah TNKTB dan SIOKTB yang	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Jumlah Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat	Unit	765	1100	500	800	1100	500	500	1100		
									Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor	Unit	900	1100	500	800	1100	500	500	1100		
		Meningkatnya kepatuhan lalu lintas	Persentase kepatuhan lalu lintas	Rasio kendaraan yang dinyatakan tertib terhadap jumlah total kendaraan yang diperiksa dalam operasi penegakan hukum lalu					(Jumlah kendaraan yang tertib/Jumlah	%	60,96	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi
									Sumber Data:											
									Jumlah kendaraan yang tertib	Kendaraan	3061	2640	2860	3080	3300	3520	3740	3740		
									Jumlah kendaraan yang terperiksa	Kendaraan	5021	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400		
					1.1.1.1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi terpadu penegakan hukum bidang Perhubungan	Persentase pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap ruas jalan yang efektif	Indikator ini mengukur Jumlah gakkum yang dilaksanakan dibagi jumlah gakkum yang direncanakan. gakkum ialah operasi gabungan yang dilaksanakan antara dinas perhubungan dengan instansi terkait	(Penegakan hukum (Gakum) yang terlaksana/Gakum yang direncanakan) x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FALSE	Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, satuan, target, dan sumber data - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan sudah sesuai cascading
									Sumber Data :											
									Penegakan hukum (Gakum) yang terlaksana	kali	44	44	44	44	44	44	44	44		
									Gakum yang direncanakan	kali	44	44	44	44	44	44	44	44		
					1.1.1.7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintas	Indikator ini mengukur Jumlah orang yang datang dibagi jumlah orang yang diundang. dimana kelompok masyarakat tertentu yang telah mengikuti kegiatan edukasi atau sosialisasi mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar	(Jumlah orang yang datang/Jumlah orang yang diundang) x 100%	%	100%	71,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FALSE	Penurunan jumlah peserta sosialisasi disebabkan terkait kebijakan efisiensi terhadap uang transport peserta sosialisasi sehingga berdampak pada penurunan tingkat kedatangan peserta sosialisasi Mohon diisikan terkait dengan definisi operasional, satuan, target, dan sumber data - kegiatan, sasaran, indikator kinerja, formula perhitungan sudah sesuai cascading
									Sumber Data :											
									Jumlah orang yang datang	orang	900	1050	580	560	540	520	520	520		
									Jumlah orang yang diundang	orang	900	1470	580	560	540	520	520	520		
1.2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perhubungan yang Baik dan Adaptif	1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)					- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (83,70)	A (83,80-85,00)	A (83,86-85,00)	A (83,92-85,00)	A (83,97-85,00)	A (84,03-85,00)	A (84,03-85,00)	A (84,10-85,00)	FALSE	- program dan kegiatan internal belum tercantun
									Sumber data :											
									- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (83,70)	A (83,80-85,00)	A (83,86-85,00)	A (83,92-85,00)	A (83,97-85,00)	A (84,03-85,00)	A (84,03-85,00)	A (84,10-85,00)		
			- Nilai SPIP Dinas Perhubungan	menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50					- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Optimum	Optimu	Optimu	Optimu	Optimu	Optimu	Optimu	Optimu		
									Sumber data :											
									- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Optimum (3,47)	Optimum (3,48-4)	Optimum (3,49-4)	Optimum (3,50-4)	Optimum (3,51-4)	Optimum (3,52-4)	Optimum (3,52-4)	Optimum (3,53-4)		
			Nilai IKM Dinas Perhubungan						- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	80	80,01	80,02	80,03	80,04	80,04	80,05		
									Sumber Data :											
										Nilai	-	80	80,01	80,02	80,03	80,04	80,04	80,05		
					1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan	Mengukur kualitas penyusunan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber Data :											
									Jumlah Dokumen perencanaan,			16	16	16	16	16	16	16		
									Jumlah Dokumen perencanaan,			16	16	16	16	16	16	16		

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan	Catatan
												2025	2026	2027	2028	2029				
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas	Perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap ketersediaan data statistik	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data										FALSE	
									Jumlah Data statistik yang disediakan		1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									Jumlah Data statistik sektoral		1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
					1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan	Mengukur kualitas penilaian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria:	Hasil penilaian pengelolaan keuangan	Nilai		5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber Data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan	Nilai		5	5	5	5	5	5	5		
					1.2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas Perhubungan	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan	Mengukur kualitas penilaian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip	Nilai		5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber Data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan										FALSE	
					1.2.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Perhubungan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas	Nilai	85,36	85,37	85,38	85,39	85,4	85,41	85,41	85,42	FALSE	
									Sumber Data :											
									Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Nilai	85,36	85,37	85,38	85,39	85,4	85,41	85,41	85,42		
					1.2.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Rasio penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip	Nilai	80,11	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,6	80,7	FALSE	
									Sumber Data :											
									Hasil Penilaian Pengawasan Arsip											
					1.2.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas Perhubungan	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan	Rasio penilaian pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan oleh BPKAD	Hasil penilaian pengelolaan keuangan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber Data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100		
					1.2.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Perhubungan		Jumlah belanja Dinas Perhubungan yang diinputkan pada SIRUP dibagi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber Data :											
									Jumlah belanja Dinas Perhubungan	Rupiah										
									Jumlah belanja pada DPA Dinas	Rupiah										
					1.2.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria:	Hasil penilaian pengelolaan keuangan	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber Data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan											

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

Jl. Kenari, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55165

@kominfosankotayk

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2025 – 2029

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya-lah dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berhasil disusun.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana dalam dokumen ini menjabarkan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, serta rencana pencapaian empat tahunan. Selain itu juga menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan untuk dilaksanakan. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2025-2029 ini sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, juga sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis dan evaluasi kinerja.

Secara substansial program dan kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang merupakan arah pembangunan kota Yogyakarta lima tahun ke depan.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, semoga dokumen rencana strategis ini mampu memberikan manfaat untuk perkembangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta kedepan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kota Yogyakarta

Ignatius Tri hastono, S.Sos., M.M.
NIP. 196907231996031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memastikan keselarasan program, kegiatan, dan kebijakan Dinas dengan arah pembangunan kota serta prioritas Kepala Daerah dalam lima tahun mendatang, yang berlandaskan pada visi pembangunan Kota Yogyakarta.

Selain menjadi pedoman pembangunan sektoral, Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis yang menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja dinas. Program dan kegiatan dalam Renstra disusun sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD. Pelaksanaannya akan mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi lintas pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II-1
2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian II-2
2.2 Permasalahan Yang Dihadapi II-5
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah II-8
2.4 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah II-8
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah II-10
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah III-4
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah III-5
3.4 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah III-7
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah III-13
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah IV-1
4.2 Program Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-35
4.3 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PErangkat Daerah IV-37
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) V-39
BAB V PENUTUP V-1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah II-12
Tabel 3.1 Tujuan Dinas Kominfo dan Persandian III-1
Tabel 3.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo dan Persandian III-2
Tabel 3.3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD III-3
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD III-9
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD III-13
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD IV-3
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta IV-12
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas IV-35
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah IV-38
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci IV-40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat saat ini telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya termasuk dalam bidang pemerintahan khususnya dalam fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan masyarakat modern. Kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pemerintahan.

Perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi juga menyebabkan berubahnya pola komunikasi yang terjadi di masyarakat, penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan juga sebaliknya pada saat ini menjadi lebih beragam bentuknya. Reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governnance*.

Sementara itu bagi Pemerintah Kota Yogyakarta , dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta, terutama dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi umum, akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah, peningkatan Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan ditingkatkan sebagai bagian dari faktor penentu untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan data driven government yang menjadi aset dalam penentuan kebijakan yang diambil.

Sejalan dengan upaya di atas diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek insfrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi tata kelola pemerintahan yang aman dan akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi sehingga penyelenggaraan

pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat dearah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat perangkat daerah untuk mendukung perencanaan tingkat kota. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Guna lebih meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan - Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di Komunikasi dan Informatika.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;

9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:

11) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;

12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:;

13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;

14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);

15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):

16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2025-2029 mendatang.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian dalam menyusun Renja Dinas Komunikasin Informatika dan Persandian sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025 s/d 2029 ini yaitu :

1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2) Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk periode tahun 2025-2029
3) Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka waktu 5 Tahun
5) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan
6) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dasar hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan dan Isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN: Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persanidian Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Struktur Organisasi

a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari
d. Bidang Sistem Informasi dan Statistik, terdiri atas:
e. Bidang Infrastruktur Telematika, terdiri atas:
f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri atas:
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

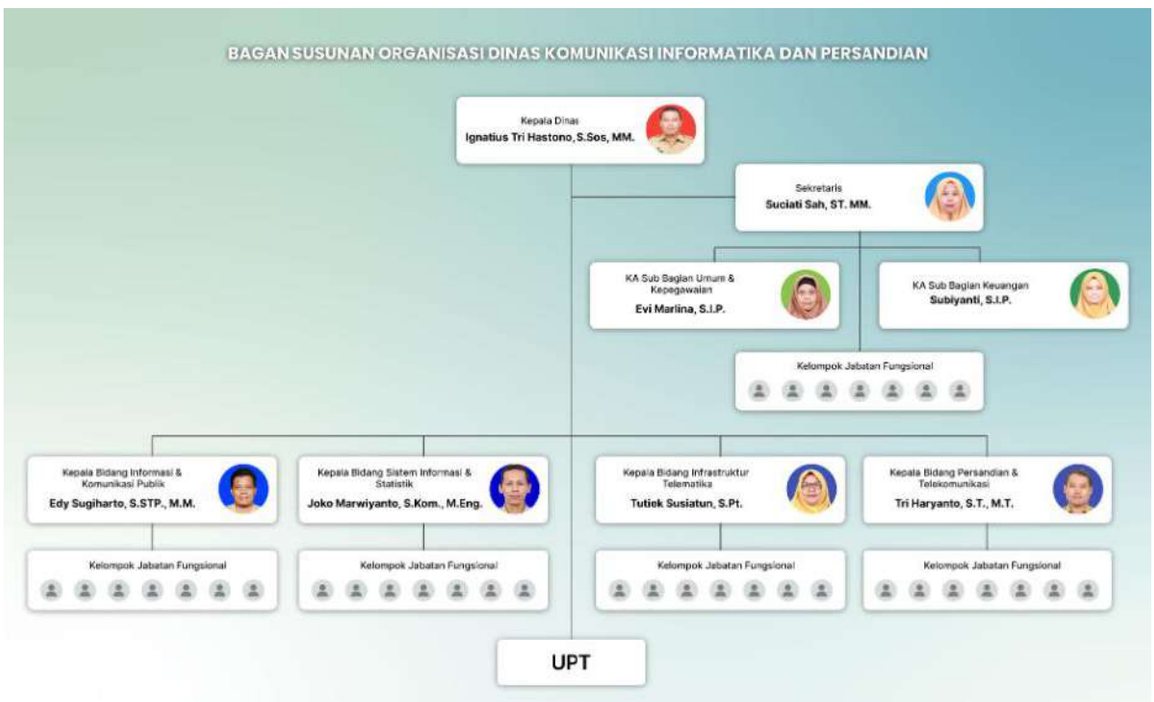

Gambar: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

A. Kondisi Pegawai

Kondisi riil Pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan

operasionalnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2025 didukung oleh pegawai sebanyak 83 orang ASN (Terdiri dari 79 ASN dan 4 orang PPPK, Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP) sebanyak 42 orang. Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II	1
III	5
Non Eselon	77

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

Tabel Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jabatan	Golongan / Jabatan	Jumlah (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	3
	Penata Tk. I, III/d	1
Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I , III/d	2
Jabatan Fungsional	Analis Kebijakan Ahli Muda	7
	Prana Komputer Ahli Muda	4
	Sandiman Ahli Muda	2
	Perencana Ahli Muda	1
	Pranata Komputer Ahli Pertama	7
	Pranata Komputer Mahir	1
	Pranata Komputer Terampil	4
	Pranata Humas Ahli Pertama	1
	Pratana Humas Terampil	2
	Sandiman Ahli Pertama	2
	Sandiman Mahir	1
	Pranata SDM Aparatur Mahir	1
	Statistisi ahli pertama	1
Staf	Penata III/c	1
	Penata Muda Tk I, III/b	9
	Penata Muda, III/a	6
	Pengatur Tingkat I, II/d	6
	Pengatur, II/c	15
P3K	Pranata Humas	1
	Penata Layanan Operasional	1
	Pengelola Layanan Operasional	2

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil
1	S2	10
2	S1	36
3	D IV	1
4	D III	35
5	SMA	2
6	SMP	-
	Jumlah	83

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki- Laki	45	54.21%
Perempuan	38	45.79%
Jumlah	83	100%

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

Tabel Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

No	Kelompok Jabatan /Subbag Seksi	Jumlah Pegawai	
		Eksisting	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Jabatan Fungsional	35	59
3	Sekretariat	10	15
4	Bidang Informasi dan Statistik	8	13
5	Bidang Komunikasi Publik	11	23
7	Bidang Infrastruktur Telematika	8	17
8	Bidang persandian	10	15
	Jumlah	83	143

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta **belum memenuhi jumlah ideal** pegawai dibandingkan dengan beban kerja walau sudah menyertakan jumlah tenaga bantuan dan tenaga teknis yang ada.

B. Perlengkapan

Aset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaran Roda Empat	5
2.	Kendaraan Roda Dua	17
3.	Ruang Rapat	3

4.	Komputer	164
5.	Printer	30
6.	Notebook	32
7.	Telepon	661
8.	Mesin Faximile	49
9.	Meja Kerja	186
10.	Kursi Kerja	183
11.	Meja Rapat	30
12.	Kursi Rapat	189
13.	Almari	22
14.	Filing Kabinet	17
15.	Laptop /notebook	19
16.	AC	41
17.	Access Point	417
18.	Switch	372
19.	UPS	155
20.	Server	72
21.	CCTV	30
22.	Buku Perpustakaaan	310
23.	Air Purifier	3
24.	Alat Pemotong Kertas	4
25.	Alat Pengukur ketinggian	1
26.	Alat pengukur radiasi	1
27.	Amplifier	33
29.	Brankas	2
29.	Kamera	10
30.	LCD Projector	14
31.	White board	7
32.	Gedung Kantor	1

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian

2.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID utama Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan

keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik, permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa sebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan dukungan pada pengeloaan dan penyelesaian aduan.

B. Permasalahan Pengembangan SPBE

Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingaa saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/*cross cutting* dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE.

Tantangan dalam pengembangan SPBE antara lain mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal.

Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastuktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan

kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan.

C. Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dnegan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar.

Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Yogyakarta saat ini adalah 1,92 kebanyakan masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kota Yogyakarta kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik.

D. Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, virus komputer, kegagalan

sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu.

Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (*IT security awareness*) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kesadaran kemananan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif.

2.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada renstra sebelumnya telah ditetapkan dengan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI					
				2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4		4	5	6	7	
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	Skala 0 - 100	**Target**	74.00	87.91	91.21	84.47	86.14
			Realisasi	82.96	89.10	112.59	86.61	91.79
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	Poin	**Target**	84.40	88	94	398	403
			Realisasi	84.40	88	100	589	592
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	**Target**	-	-	A	A	A
			Realisasi	-	-	A	A	A

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persanadian memiliki 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Layanan Informasi Publik, Meningkatnya Keamanan Informasi dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

2.4 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja sama daerah adalah Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama

daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta telah mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, adapun kerjasasama daerah yang masih aktif dilaksanakan dan terdata pada SIM Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut :

No	Nama Kerja Sama Daerah	Pihak Ketiga	Bidang Pengampu
1	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Bank Pembangunan Daerah DIY Tentang Integrasi Kanal Tunggal Pembayaran dengan QRIS BPD DIY	Bank BPD DIY	Bidang SIS
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT BP Kedaulatan Rakyat tentang Kerja sama dalam peliputan dan diseminasi program pembangunan dan pelayanan Publik di Kota Yogyakarta	PT. BP Kedaulatan Rakyat	Bidang IKP
3	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengembangan *Smart City-Smart Regency* untuk mewujudkan *Smart Province*	Pemerintah Propinsi DIY dan Kabupaten	Bidang IT dan Bidang SIS
4	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta	Badan Siber dan Sandi Negara	Bidang Persandian
5	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Optimalisasi Jogja Smart Province dengan Pendekatan Road Safety Policing di Kota Yogyakarta	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Polresta)	Bidang IKP
6	Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sinergi Pemanfaatan Infrastruktur *Closed-Circuit* Television (CCTV) di Wilayah Kota Yogyakarta sebagai sinergi pelaksanaan kebijakan dalam	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang IT

	bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta		
7	Kerjasama Produksi dan Penyiaran Program pembangunan di wilayah kota Yogyakarta	Radio Republik Indoneisa	BIdang IKP
8	Kerjasama produksi dan penyiaran publikasi pembangunan	TVRI	Bidang IKP

2.5 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Salah satu isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan *Good Government Governance*. Mewujudkan good government governance di Kota Yogyakarta menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pelayanan pada skala regional bahkan nasional, berperan sebagai kota yang menghubungkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Penerapan prinsip *good government governance* harus dapat diterjemahkan dalam berbagai aspek yang menyangkut penggunaan layanan IT antara lain pengelolaan keuangan daerah, manajemen ASN, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Begitu pula, penguatan literasi digital dan kapasitas manajerial aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian, agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan lebih efektif.

Sejalan dengan hal tersebut diatas eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *Smart City* di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Implementasi Data *Driven-Government*
3. Optimalisasi pengelolaan pusat data pemerintah yang terstandar
4. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi
6. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
7. Penguatan ekosistem digital di Kota Yogyakarta

8. Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)
9. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses
10. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pada Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan pengelolaan data.

Tabel 2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Komunikasi dan Informatika	Tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal	Dinas Kominfo dan Persandian tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui ketugasan dari Dinas Kominfo dan Persandian	Fasilitasi interoperabilitas data antar lembaga pemerintah, serta layanan *e-Residency* yang mempermudah akses bisnis digital (Estonia). Pengintegrasian teknologi *IoT, Big Data*, dan AI untuk mendukung berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari transportasi hingga layanan kesehatan digital (Singapura) Implementasi NemID, sebuah sistem identitas digital yang digunakan untuk berbagai transaksi pemerintahan dan layanan swasta (Denmark)	Percepatan digitalisai untuk Indonesia terintegrasi pemerintahan digital kini telah bertransformasi menjadi *smart governance,* yang menekankan pada penggunaan teknologi canggih seperti AI, *Big Data, dan Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan *experience* dan kepuasan masyarakat yang lebih baik	Program Jogja *Smart Provincy* guna mewujudkan DIY sebagai provinsi cerdas yang inovatif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *Smart City* di Pemerintah Kota Yogyakarta Pengelolaan pusat data pemerintah sesuai standar ISO 27001:2022 Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perkembangan TIK yang memunculkan tren industri 4.0 secara global, ditandai dengan berkembangnya terobosan-terobosan teknologi, meliputi *Artificial Intelligence* (AI), *robotic, Internet of Things* (IoT)	Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE		
	Peralatan infrastrutur Jaringan TI yang telah kadaluarsa untuk pengadaan pembaruan terkendala anggaran rasionalisasi	Pengelolaan Sampa yang belum optimal dengan penyediaan CCTV di depo-depo sampah untuk pemantauannya.			Penyediaan CCTV untuk membantu penegakan hukum	Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta
	Estetika perkotaan yang perlu dijaga dan ditingkatkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi telekomunikasi			Ketimpangan sebaran penyelenggara konektivitas sehingga perlu dilakukan upaya penataan kesehatan industri dan konektivitas telekomunikasi	Penataan estetika sumbu filosofis Yogyakarta	Penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasidi Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal dalam kehidupan bermasyarakat		Pembangunan budaya digital dan pemanfaatan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital			Penguatan ekosistem digital di Kota Yogyakarta
	Upaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan			Pengembangan komunikasi publik sebagai penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik		Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)
	Kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif					Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kecakapan digital sumber daya manusia yang belum merata					Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Statistik	Belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar		Ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK antar negara berdampak pada kemampuan pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data statistik sektoral secara digital	Percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah	Peningkatan kualitas statistik sektoral karena Belum semua PD menghasilkan data statistik yang berkualitas sesuai standar, salah satunya karena belum adanya pembinaan statistik sektoral yang menyeluruh	Implementasi data *driven-goverment*

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kota Yogyakarta yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" dengan misi **Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola,** yaitu transformasi pembangunan yang fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada pelayanan publik berintegritas, adaptif, dan inovatif dalam rangka melakukan akselerasi, mewujudkan stabilitas serta memastikan kesinambungan pembangunan di Kota Yogyakarta, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase Tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	(25% x tingkat capaian keterbukaan informasi publik) + (25% x tingkat capaian Nilai SPBE) + (25% x tingkat capaian Nilai IPS) + (25% x tingkat capaian Indeks KAMI)	70,82	73,34	75,61	77,11	78,75	79,75

Tabel 3.2 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
1.2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE Oleh Kementrian PAN-RB	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,55
1.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai IPS hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPS Pusat	2,85	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20
1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI berdasarkan hasil verifikasi Badan Siber dan Sandi Negara	590	600	605	610	615	615
1.5. Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital		Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	70,82	73,34	75,61	77,11	78,75	79,75	
		1.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
		1.2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,55	
		1.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,85	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20	
		1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	590	600	605	610	615	615	
		1.5. Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan	A	A	A	A	A	A	

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sasaran rentra perangkat daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya Tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital maka Diskominfosandi menetapkan 5 (lima) sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan indikator kinerja Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berupa nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan indikator kinerja Indeks SPBE berupa nilai Hasil Evaluasi SPBE oleh Kemeterian PAN-RB.

3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral ditetapkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berupa nilai IPS hasil evaluasi pembangunan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

4) Meningkatnya Keamanan Informasi

Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi ditetapkan indikator Kinerja Indek Kemanan Informasi (Indeks KAMI) berupa hasil penilaian Indeks KAMI berhadasarkan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) Meningkatnya Tata Kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang Baik dan Adaptif

Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ditetapkan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan berupa hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dijabarkan dalam tabel berikut ini :

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya melalui penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, yang melibatkan teknologi, keterampilan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara *real-time*, memberikan pembaruan berkala terkait program-program pemerintah, kebijakan baru, serta hasil yang telah dicapai dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Selain itu, melayani aduan publik dengan respon cepat dan tepat adalah kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Respon yang cepat saja tidak cukup, karena harus diikuti dengan solusi yang tepat dan efektif.

2. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika

Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika dalam konteks SPBE sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pengintegrasian sistem dan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi informatika di berbagai instansi pemerintah terintegrasi dengan baik, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan internet serta konektivitas, keamanan data dan perlindungan informasi dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi dan privasi, peningkatan kapasitas pengelola aplikasi (menyediakan pelatihan teknis untuk para pengelola aplikasi dan tenaga IT pemerintah agar mereka memiliki keterampilan terbaru dalam mengelola aplikasi berbasis SPBE), serta meningkatkan literasi digital baik untuk pegawai pemerintah maupun masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan aplikasi informatika dengan optimal.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekosistem digital di Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan literasi digital yang dikemas dalam bentuk gelar wicara (talk show), diskusi, atau sosialisasi interaktif, dengan membahas berbagai topik,

antara lain pemasaran digital (digital marketing), pembuatan konten kreatif, pemanfaatan teknologi informasi, serta isu penting terkait keamanan informasi dan etika digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya menyasar pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum dan pelajar, yang bertujuan adalah untuk memperluas dampak program sekaligus memperkuat budaya digital yang sehat dan produktif di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan program aplikasi infomatika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta juga memiliki tugas strategis dalam penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai bagian dari upaya menjaga keteraturan, keselamatan, dan estetika kota. Penataan dilakukan melalui penyesuaian dan pengalihan bentuk menara telekomunikasi di Kawasan Sumbu Filosofi, yang dilaksanakan dengan penyesuaikan menara telekomunikasi menjadi tiang penerangan jalan umum, pemasangan antena pada bangunan (wall mounting) dan menara rooftop dengan ketinggian maksimal enam meter. Penataan jaringan fiber optik mencakup pengalihan jalur (rerouting) pada ruas jalan yang memiliki kepadatan kabel tinggi, pemanfaatan tiang bersama untuk mengurangi jumlah tiang yang berlebihan dalam satu rumpun tiang, penempatan kabel ke dalam saluran bawah tanah (ducting) yang telah terbangun, penataan dan perapian kabel yang menjuntai agar tidak membahayakan pengguna jalan, serta penyederhanaan jumlah kabel dengan penggunaan kabel dengan core lebih besar untuk tetap menjaga fungsi dan mengurangi polusi visual perkotaan.

Dalam aspek pengendalian, dilakukan proses telaah teknis dan pemberian rekomendasi lokasi terhadap pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik sebelum diterbitkan perizinan atau persetujuan bangunan oleh dinas yang berwenang. Sementara itu, pengawasan dilaksanakan melalui kewajiban pelaporan tahunan oleh penyelenggara layanan telekomunikasi mengenai kondisi infrastruktur pasif yang dimiliki, serta pelaksanaan survei lapangan untuk memastikan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian integral dari strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi yang tertib, aman, estetis, dan mendukung pengembangan layanan digital yang andal bagi masyarakat.

3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Statistik sektoral adalah data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan berdasarkan sektor atau bidang tertentu. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih akurat, terperinci, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan, lembaga pemerintah, serta masyarakat.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam era digital saat ini, di mana data dan informasi sangat rentan terhadap ancaman siber, penerapan teknologi persandian yang efektif adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan atau disimpan. Meningkatkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi akan membantu meminimalkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, dan gangguan keamanan lainnya. Peningkatan penyelenggaraan persandian melalui Indeks KAMI bertujuan untuk memperkuat sistem pengamanan informasi, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa setiap proses pengelolaan informasi terlindungi dari ancaman yang tidak diinginkan.

Untuk mengurangi risiko keamanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan. Kebijakan ini harus diikuti oleh seluruh karyawan dan harus mencakup semua aspek keamanan informasi.
2. Melakukan pelatihan keamanan informasi kepada seluruh karyawan. mencakup kesadaran tentang risiko keamanan informasi dan tindakan yang harus diambil untuk menghindari risiko tersebut.
3. Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi dan mengambil tindakan untuk meminimalkannya.
4. Menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewalls, anti-virus, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber.
5. Menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti otentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP membantu untuk memastikan transparansi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta

2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik;
3. Akselerasi Pembangunan Prioritas;
4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan
5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan dasar dan kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Inforamtika dan Persandian Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

   Dalam tahap penguatan dasar dan kapasitas pembangunan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta akan dilaksanakan melalui Pengembangan Jogja Smart Service (JSS) yang merupakan konsep implementasi teknologi di semua lini pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta, Optimalisasi teknologi bigdata untuk mengolah data sebgai sumber informasi dalam pengambilan kebijakan, katalog kebutuhan Pengolahan data/informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan, Menyediakan sistem sebagi media visualisasi data/informasi. Sistem akan didesain untuk bisa memberikan gambaran ke depan berdasarkan data/informasi dan menyediakan opsi-opsi keputusan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan, penyiapan aset data OPD untuk mendukung penyusunan profil perangkat daerah, Menyiapkan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional, penyiapan infrastruktur jaringan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat berbasis digital. meningkatkan kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta, serta pelaksanaan survey jaringan fiber optic di Kota Yogyakarta guna pelaksanaan penataan estetika Kota Yogyakarta yang berkelanjutan.

Pelaksanaan tahap penguatan dasar dan kapasitas pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini diperlukan kerjasama dengan pihak lain sebagai perwujudan crosscutting guna mendukung keberhasilan setiap program kegiatan, adapun crosscutting yang diharapkan adalah adanya kolaborasi dengan Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bappeda, BKPSDM, Inspektorat, BPKAD dalam hal Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Evidence SPBE dan Bagian Kerjasama dalam penataan fiber optik.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata dan aman.

Dalam tahap peningkatan akses dan kualitas layanan publik ini Diskominfosandi melaksanakan dengan Pemanfaatan Internet of things (IoT) dan basis data yang terintegrasi (Big Data) serta kolaboratif antar sektor/wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman, Pengembangan menu dan modul layanan pada Jogja Smart Service (JSS) guna mendukung implementasi teknologi di semua lini pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Cross cuting yang diperlukan dalam tahap ini adalah Dengan Inspektorat dalam Terlaksananya Audit TIK (Audit aplikasi SPBE, Audit infrastruktur SPBE, Audit keamanan SPBE).

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam mendukung tercapianya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan.

Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

Akselerasi pembangunan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dilaksanakan dengan pengembangan pusat data pemerintah, Interkoneksi Semua Gedung Kantor milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan intranet yang berbasis jaringan fiber optic yang mendukung kecepatan gigabit, dan penambahan fitur dan modul layanan pada Jogja Smart Service, serta dilaksanakan dengan pengembangan komunikasi dan informasi publik melalui berbagai media dalam penyampaian informasi program-program pemerintah kepada masyarakat.

Cross cutting yang diperlukan dalam tahapini adalah menjalin kerjasama dengan BKPSDM dalam rangka penyiapan SDM yang handal dalam bidang IT dan Komunikasi publik.

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan

yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Permbangunan terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan dengan Pelaksanaan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional, Implementasi sertifikasi pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta. Optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia dengan pelatihan penguatan ekosistem digital bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Melakukan literasi digital tentang pemasaran digital dan keamanan informasi kepada masyarakat khususnya pada kelompok UMKM, Kampung Wisata, dan/atau Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta serta Menginisiasi kanal digital sebagai sarana penyampaian informasi dan publikasi (channel YKTV), optimalisasi kerjasama publikasi dengan industri media sebagai cara aplifikasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target tujuan dan sasaran Dinas Komunkasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tercapai sebagai indikator keberhasilan guna mendukuung terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

Dalam tahap ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mentargetkan semua lini layanan publik dapat dilaksanakan secaraq digital melalui aplikasi Jogja Smart SErvice, Pemanfaatan Internet of things (IoT) dan basis data yang terintegrasi (Big Data) serta kolaboratif antar sektor/wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman, peningkatan implementasi SPBE, implementasi dan evaluasi tindaklanjut peraturan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Manajemen Data dan Interoperabilitas, Melakukan Pengukuran Indeks KAMI, Melakukan audit internal SPBE dan SMKI

secara rutin, Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Meningkatkan kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta, serta pelaksanaan survey Persepsi Publik Terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode pembangunan yang berjalan.

Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periodeperiode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.5 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital			
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Memperkuat dukungan kebijakan, promosi dan akses pembiayaan terhadap ekosistem industri kreatif	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mempercepat transformasi digital dengan pembangunan kapasitas penggunaan teknologi	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Menyelenggarakan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		Mengoptimalkan penggunaan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity)	Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Telematika	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, melalui:	Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral	Meningkatkan Penerapan Prinsip Satu Data	
		Meningkatkan pemanfaatan data sektoral dalam pembangunan		
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatkan keamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi	
5	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang Baik dan Adaptif	Meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	
		Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- Program/Kegiatan Strategis: Program yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena urgensinya yang tinggi, program ini mendapat prioritas dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Program strategis juga menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
- Program/Kegiatan Operasional: Program yang bersifat teknis dan mendukung implementasi kebijakan strategis. Meskipun cakupannya lebih terbatas, program operasional tetap penting untuk menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam dokumen ini, program strategis dijabarkan secara terperinci pada bab sebelumnya sebagai program prioritas, sedangkan program/kegiatan operasional dijabarkan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat

daerah yaitu pijakan Renja PD sampai dengan tahun 2029. Pada kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyususnan Renstra Perangkat Daerah menjelaskan kinerja pencapain target yang berisikan sasaran, indikator, outcome, output dan pagu belanja serta proyeksi selama periode tahun 2025-2029. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan renstra Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital				Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital		
		1.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik		
			Meningkatnya Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta		Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1. Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					2. Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Sub Kegiatan Relasi Media	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat	Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
		1.2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE		
			Meningkatnya Kebijakan dan Layanan SPBE		Nilai domain layanan Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE		Nilai sub domain teknologi informasi SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Telematika	Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi		Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya Manajemen SPBE		Nilai Domain Manajemen SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Kesesuaian Implementasi terhadap Kebijakan SPBE	Tingkat Kematangan Audit TIK	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
		1.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD	Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral		Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Penerapan Prinsip Satu Data	Persentase keterisian daftar data statistik sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)		
						Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		
			Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi		Nilai Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pengamanan informasi	Persentase JKS yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		1.5. Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian		
					Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian		
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	
						Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Sub Kegiatan Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				30.862.102.242		30.862.102.242		31.489.666.000		32.288.849.000		33.166.712.000		34.308.924.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				12.453.761.810		12.453.761.810		12.707.049.000		13.029.535.000		13.383.789.000		13.844.686.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian	79.92 nilai	82 nilai	12.995.356.010	84 nilai	12.453.761.810	86 nilai	12.707.049.000	87 nilai	13.029.535.000	88 nilai	13.383.789.000	89 nilai	13.844.686.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		
	Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian	A nilai	A nilai		A nilai		A nilai		A nilai		A nilai		A nilai		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.663.000		47.869.000		48.837.000		50.073.000		51.431.000		53.200.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian	100 persen	100 persen	50.663.000	100 persen	47.869.000	100 persen	48.837.000	100 persen	50.073.000	100 persen	51.431.000	100 persen	53.200.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian	-	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.930.000		2.530.000		2.581.000		2.646.000		2.717.000		2.810.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	3.930.000	4 dokumen	2.530.000	4 dokumen	2.581.000	4 dokumen	2.646.000	4 dokumen	2.717.000	4 dokumen	2.810.000	
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				920.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	920.000	2 dokumen	440.000	2 dokumen	448.000	2 dokumen	459.000	2 dokumen	471.000	2 dokumen	487.000	
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				920.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	920.000	2 dokumen	440.000	2 dokumen	448.000	2 dokumen	459.000	2 dokumen	471.000	2 dokumen	487.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				740.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	740.000	2 dokumen	440.000	2 dokumen	448.000	2 dokumen	459.000	2 dokumen	471.000	2 dokumen	487.000	
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				740.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	740.000	2 dokumen	440.000	2 dokumen	448.000,00	2 dokumen	459.000,00	2 dokumen	471.000	2 dokumen	487.000	
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.795.000		1.815.000		1.851.000,00		1.897.000,00		1.948.000,00		2.015.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	12 laporan	3.795.000	12 laporan	1.815.000	12 laporan	1.851.000,00	12 laporan	1.897.000,00	12 laporan	1.948.000	12 laporan	2.015.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.618.000		41.764.000		42.613.000		43.694.000		44.882.000		46.427.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	39.618.000	2 laporan	41.764.000	2 laporan	42.613.000	2 laporan	43.694.000	2 laporan	44.882.000	2 laporan	46.427.000	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.525.912.000		11.254.206.000		11.483.112.000		11.774.551.000		12.094.696.000		12.511.208.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	5 nilai	5 nilai	11.254.206.000	5 nilai	11.254.206.000	5 nilai	11.483.112.000	5 nilai	11.774.551.000	5 nilai	12.094.696.000	5 nilai	12.511.208.000	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.514.802.000		11.247.716.000		11.476.494.000		11.767.767.000		12.087.732.000		12.504.007.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/ bulan	83 orang/ bulan	11.514.802.000	83 orang/ bulan	11.247.716.000	83 orang/ bulan	11.476.494.000	83 orang/ bulan	11.767.767.000	83 orang/ bulan	12.087.732.000	83 orang/ bulan	12.504.007.000	
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.840.000		880.000		897.000		919.000		943.000		975.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1.840.000	1 dokumen	880.000	1 dokumen	897.000	1 dokumen	919.000	1 dokumen	943.000	1 dokumen	975.000	
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.380.000		660.000		673.000		690.000		708.000		732.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 dokumen	12 dokumen	1.380.000	12 dokumen	660.000	12 dokumen	673.000	12 dokumen	690.000	12 dokumen	708.000	12 dokumen	732.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				660.000		660.000		673.000		690.000		708.000		732.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	660.000	12 dokumen	660.000	12 dokumen	673.000	12 dokumen	690.000	12 dokumen	708.000	12 dokumen	732.000	
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				920.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	920.000	2 laporan	440.000	2 laporan	448.000	2 laporan	459.000	2 laporan	471.000	2 laporan	487.000	
2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.140.000,00		660.000		673.000		690.000		708.000		732.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	1.140.000,00	2 dokumen	660.000	2 dokumen	673.000	2 dokumen	690.000	2 dokumen	708.000	2 dokumen	732.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.825.000		3.025.000		3.086.000		3.164.000		3.250.000		3.361.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	4.825.000	12 laporan	3.025.000	12 laporan	3.086.000	12 laporan	3.164.000	12 laporan	3.250.000	12 laporan	3.361.000	
2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				345.000		165.000		168.000		172.000		176.000		182.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	345.000	1 dokumen	165.000	1 dokumen	168.000	1 dokumen	172.000	1 dokumen	176.000	1 dokumen	182.000	
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.535.000		4.675.000		4.766.000		4.884.000		5.015.000		5.186.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	5 nilai	5 nilai	6.535.000	5 nilai	4.675.000	5 nilai	4.766.000	5 nilai	4.884.000	5 nilai	5.015.000	5 nilai	5.186.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	330.000	2 dokumen	330.000	2 dokumen	336.000	2 dokumen	344.000	2 dokumen	353.000	2 dokumen	365.000	
2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	330.000	1 dokumen	330.000	1 dokumen	336.000	1 dokumen	344.000	1 dokumen	353.000	1 dokumen	365.000	
2.16.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				330.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	330.000	1 laporan	330.000	1 laporan	336.000	1 laporan	344.000	1 laporan	353.000	1 laporan	365.000	
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.525.000		3.025.000		3.086.000		3.164.000		3.250.000		3.361.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	4.525.000	12 laporan	3.025.000	12 laporan	3.086.000	12 laporan	3.164.000	12 laporan	3.250.000	12 laporan	3.361.000	
2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan				690.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Barang Milik Daerah pada SKPD															
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	690.000	12 laporan	330.000	12 laporan	336.000	12 laporan	344.000	12 laporan	353.000	12 laporan	365.000	
2.16.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	330.000	2 dokumen	330.000	2 dokumen	336.000	2 dokumen	344.000	2 dokumen	353.000	2 dokumen	365.000	
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.555.000		3.795.000		3.871.000		3.968.000		4.074.000		4.213.000	
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian	86,46 nilai	86,46 nilai	6.555.000	86,66 nilai	3.795.000	86,66 nilai	3.871.000	86,86 nilai	3.968.000	86,86 nilai	4.074.000	87 nilai	4.213.000	
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.020.000		660.000		673.000		690.000		708.000		732.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	1.020.000	12 dokumen	660.000	12 dokumen	673.000	12 dokumen	690.000	12 dokumen	708.000	12 dokumen	732.000	
2.16.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				690.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	690.000	12 dokumen	330.000	12 dokumen	336.000	12 dokumen	344.000	12 dokumen	353.000	12 dokumen	365.000	
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.845.000		2.805.000		2.862.000		2.934.000		3.013.000		3.116.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	12 dokumen	4.845.000	12 dokumen	2.805.000	12 dokumen	2.862.000	12 dokumen	2.934.000	12 dokumen	3.013.000	12 dokumen	3.116.000	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				434.697.810,00		434.697.810,00		443.537.000,00		454.791.000,00		467.153.000,00		483.239.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian	78,38 nilai	78,88 nilai	612.551.010	79,38 nilai	434.697.810	79,88 nilai	443.537.000	80,38 nilai	454.791.000	80,88 nilai	467.153.000	81,38 nilai	483.239.000	
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.320.000		7.296.000		7.444.000		7.632.000		7.839.000		8.108.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	6.320.000	1 paket	7.296.000	1 paket	7.444.000	1 paket	7.632.000	1 paket	7.839.000	1 paket	8.108.000	
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.901.010		62.754.560		64.030.000		65.655.000		67.440.000		69.762.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 paket	85.901.010	2 paket	62.754.560	2 paket	64.030.000	2 paket	65.655.000	2 paket	67.440.000	2 paket	69.762.000	
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.345.000		4.465.000		4.555.000		4.670.000		4.796.000		4.961.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1 paket	22.345.000	1 paket	4.465.000	1 paket	4.555.000	1 paket	4.670.000	1 paket	4.796.000	1 paket	4.961.000	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.725.000		7.756.250		7.914.000		8.114.000		8.334.000		8.621.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	1 paket	9.725.000	1 paket	7.756.250	1 paket	7.914.000	1 paket	8.114.000	1 paket	8.334.000	1 paket	8.621.000	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				221.000.000		221.000.000		225.495.000		231.218.000		237.504.000		245.683.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	221.000.000	2 dokumen	221.000.000	2 dokumen	225.495.000	2 dokumen	231.218.000	2 dokumen	237.504.000	2 dokumen	245.683.000	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				267.260.000		131.426.000		134.099.000		137.502.000		141.240.000		146.104.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	2 laporan	267.260.000	2 laporan	131.426.000	2 laporan	134.099.000	2 laporan	137.502.000	2 laporan	141.240.000	2 laporan	146.104.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		10.000.000		10.203.000		10.461.000		10.745.000		11.115.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	5 nilai	-	-	5 nilai	10.000.000	5 nilai	10.203.000	5 nilai	10.461.000	5 nilai	10.745.000	5 nilai	11.115.000	
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		10.000.000		10.203.000		10.461.000		10.745.000		11.115.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	-	4 unit	10.000.000	4 unit	10.203.000	4 unit	10.461.000	4 unit	10.745.000	4 unit	11.115.000	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				292.662.000		296.516.000		302.546.000		310.222.000		318.655.000		329.629.000	
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian	100 persen	100 persen	292.662.000	100 persen	296.516.000	100 persen	302.546.000	100 persen	310.222.000	100 persen	318.655.000	100 persen	329.629.000	
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.750.000		3.000.000		3.061.000		3.138.000		3.223.000,00		3.334.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	6.750.000	12 laporan	3.000.000	12 laporan	3.061.000	12 laporan	3.138.000	12 laporan	3.223.000	12 laporan	3.334.000	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		30.000.000		30.610.000		31.386.000		32.239.000		33.349.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.610.000	12 laporan	31.386.000	12 laporan	32.239.000	12 laporan	33.349.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Listrik yang Disediakan														
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.400.000		12.000.000		12.244.000		12.554.000		12.895.000		13.339.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	14.400.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.244.000	12 laporan	12.554.000	12 laporan	12.895.000	12 laporan	13.339.000	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.512.000		251.516.000		256.631.000		263.144.000		270.298.000		279.607.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	241.512.000	12 laporan	251.516.000	12 laporan	256.631.000	12 laporan	263.144.000	12 laporan	270.298.000	12 laporan	279.607.000	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.478.000		402.003.000		410.177.000		420.585.000		432.020.000		446.896.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	5 nilai	5 nilai	500.478.000	5 nilai	402.003.000	5 nilai	410.177.000	5 nilai	420.585.000	5 nilai	432.020.000	5 nilai	446.896.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.940.000		27.140.000		27.692.000		28.394.000		29.166.000		30.170.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	1 unit	26.940.000	1 unit	27.140.000	1 unit	27.692.000	1 unit	28.394.000	1 unit	29.166.000	1 unit	30.170.000	
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				153.578.000		151.863.000		154.951.000		158.883.000		163.203.000		168.823.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	21 unit	153.578.000	21 unit	151.863.000	21 unit	154.951.000	21 unit	158.883.000	21 unit	163.203.000	21 unit	168.823.000	
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.400.000		23.500.000		23.977.000		24.585.000		25.253.000		26.122.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	38 unit	28.400.000	38 unit	23.500.000	38 unit	23.977.000	38 unit	24.585.000	38 unit	25.253.000	38 unit	26.122.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				291.560.000		199.500.000		203.557.000		208.723.000		214.398.000		221.781.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	291.560.000	2 unit	199.500.000	2 unit	203.557.000	2 unit	208.723.000	2 unit	214.398.000	2 unit	221.781.000	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.765.638.500		4.342.764.500		4.431.093.000		4.543.552.000		4.667.043.000		4.827.772.000	
Meningkatnya OPD dengan kategori informatif	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	35.85 persen	47.17 persen	594.238.000	56.60 persen	713.918.000	66.04 persen	728.438.000	75.47 persen	746.925.000	84.91 persen	767.225.000	94.34 persen	793.647.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.765.638.500		4.342.764.500		4.431.093.000		4.543.552.000		4.667.043.000		4.827.772.000	
Meningkatnya Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat	Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP	96.79 persen	97,25 persen	594.238.000	97,50 persen	713.918.000	97,75 persen	728.438.000	98,00 persen	746.925.000	98,25 persen	767.225.000	98,50 persen	793.647.000	
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				240.900.000		228.190.000		232.831.000		238.740.000		245.228.000		253.673.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	25 komunitas	240.900.000	25 komunitas	228.190.000	25 komunitas	232.831.000	25 komunitas	238.740.000	25 komunitas	245.228.000	25 komunitas	253.673.000	
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				353.338.000		485.728.000		495.607.000		508.185.000		521.997.000		539.974.000	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	150 permohonan	353.338.000	150 permohonan	485.728.000	150 permohonan	495.607.000	150 permohonan	508.185.000	150 permohonan	521.997.000	150 permohonan	539.974.000	
Meningkatnya Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta	Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	75.20 persen	76.60 persen	4.171.400.500	76.80 persen	3.628.846.500	77.00 persen	3.702.655.000	77.20 persen	3.796.627.000	77.40 persen	3.899.818.000	77.60 persen	4.034.125.000	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.765.638.500		4.342.764.500		4.431.093.000		4.543.552.000		4.667.043.000		4.827.772.000	
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	99,85 persen	98,00 persen	4.171.400.500	98,10 persen	3.628.846.500	98,20 persen	3.702.655.000	98,30 persen	3.796.627.000	98,40 persen	3.899.818.000	98,50 persen	4.034.125.000	
	Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital	78,56 persen	62,38 persen		71,79 persen		81,19 persen		90,60 persen		100 persen		100 persen		
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				112.085.000		100.860.000		102.911.000		105.522.000		108.390.000		112.122.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	2 laporan	112.085.000	2 laporan	100.860.000	2 laporan	102.911.000	2 laporan	105.522.000	2 laporan	108.390.000	2 laporan	112.122.000	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				275.330.000		343.490.000		350.476.000		359.371.000		369.138.000		381.851.000	

Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	5 rekomendasi	275.330.000	5 rekomendasi	343.490.000	5 rekomendasi	350.476.000	5 rekomendasi	359.371.000	5 rekomendasi	369.138.000	5 rekomendasi	381.851.000	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.094.035.500		1.470.151.500		1.500.054.000		1.538.125.000		1.579.931.000		1.634.343.000	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	-	4 media	2.094.035.500	4 media	1.470.151.500	4 media	1.500.054.000	4 media	1.538.125.000	4 media	1.579.931.000	4 media	1.634.343.000	
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				1.689.950.000		1.714.345.000		1.749.214.000		1.793.609.000,00		1.842.359.000,00		1.905.809.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	-	300 konten	1.689.950.000	300 konten	1.714.345.000	300 konten	1.749.214.000	300 konten	1.793.609.000	300 konten	1.842.359.000	300 konten	1.905.809.000	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				14.868.983.700		14.065.575.932		14.351.524.000		14.715.762.000		15.115.880.000		15.636.466.000	
Meningkatnya Kebijakan dan Layanan SPBE	Nilai domain layanan Indeks SPBE	4.31 poin	4.36 poin	2.386.357.000	4.38 poin	2.386.357.000	4.40 poin	2.434.870.000	4.42 poin	2.496.666.000	4.47 poin	2.564.550.000	4.50 poin	2.652.872.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.868.983.700		14.065.575.932		14.351.524.000		14.715.762.000		15.115.880.000		15.636.466.000	

Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan	10 aplikasi	10 aplikasi	2.836.492.000	10 aplikasi	2.386.357.000	10 aplikasi	2.434.870.000	10 aplikasi	2.496.666.000	10 aplikasi	2.564.550.000	10 aplikasi	2.652.872.000	
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				652.649.000		411.057.000		419.413.000		430.057.000		441.750.000		456.963.000	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen	652.649.000	1 dokumen	411.057.000	1 dokumen	419.413.000	1 dokumen	430.057.000	1 dokumen	441.750.000	1 dokumen	456.963.000	
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				2.183.843.000		1.975.300.000		2.015.457.000		2.066.609.000		2.122.800.000		2.195.909.000	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	10 aplikasi	10 aplikasi	2.183.843.000	10 aplikasi	1.975.300.000	10 aplikasi	2.015.457.000	10 aplikasi	2.066.609.000	10 aplikasi	2.122.800.000	10 aplikasi	2.195.909.000	
Meningkatnya Manajemen SPBE	Nilai Domain Manajemen SPBE	1.64 poin	1.65 poin	-	1.8 poin	58.270.000,00	2 poin	59.454.000,00	2.2 poin	60.962.000,00	2.4 poin	62.619.000,00	2.4 poin	64.775.000,00	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.868.983.700		14.065.575.932		14.351.524.000		14.715.762.000		15.115.880.000		15.636.466.000	
Meningkatnya Kesesuaian Implementasi terhadap Kebijakan SPBE	Tingkat Kematangan Audit TIK	-	1 poin	-	2 poin	58.270.000	3 poin	59.454.000	4 poin	60.962.000	4 poin	62.619.000	4 poin	64.775.000	

2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				-		58.270.000		59.454.000		60.962.000		62.619.000		64.775.000	
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	-	4 dokumen	58.270.000	4 dokumen	59.454.000	4 dokumen	60.962.000	4 dokumen	62.619.000	4 dokumen	64.775.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi	Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani	-	100 persen	482.692.000	100 persen	482.692.000	100 persen	492.504.000	100 persen	505.003.000	100 persen	518.733.000	100 persen	536.597.000	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.868.983.700		14.065.575.932		14.351.524.000		14.715.762.000		15.115.880.000		15.636.466.000	
Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar	-	66,45 persen	495.336.000	72,90 persen	482.692.000	79,35 persen	492.504.000	85,81 persen	505.003.000	92,26 persen	518.733.000	100 persen	536.597.000	
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan				316.116.000		306.872.000		313.110.000		321.056.000		329.785.000		341.142.000	
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	1 aplikasi	316.116.000	1 aplikasi	306.872.000	1 aplikasi	313.110.000	1 aplikasi	321.056.000	1 aplikasi	329.785.000	1 aplikasi	341.142.000	

2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				179.220.000		175.820.000		179.394.000		183.947.000		188.948.000		195.455.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-	1 dokumen	179.220.000	1 dokumen	175.820.000	1 dokumen	179.394.000	1 dokumen	183.947.000	1 dokumen	188.948.000	1 dokumen	195.455.000	
Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Nilai sub domain teknologi informasi SPBE	3.75 poin	3.80 poin	11.537.155.700	3.90 poin	11.138.256.932	4.00 poin	11.364.696.000	4.10 poin	11.653.131.000	4.20 poin	11.969.978.000	4.20 poin	12.382.222.000	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.868.983.700		14.065.575.932		14.351.524.000		14.715.762.000		15.115.880.000		15.636.466.000	
Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Telematika	Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik	10 aplikasi	10 aplikasi	11.537.155.700	10 aplikasi	11.138.256.932	10 aplikasi	11.364.696.000	10 aplikasi	11.653.131.000	10 aplikasi	11.969.978.000	10 aplikasi	12.382.222.000	
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				2.232.850.000		2.890.772.456		2.949.541.000		3.024.400.000		3.106.633.000		3.213.625.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	41 perangkat daerah	2.232.850.000	41 perangkat daerah	2.890.772.456	41 perangkat daerah	2.949.541.000	41 perangkat daerah	3.024.400.000	41 perangkat daerah	3.106.633.000	41 perangkat daerah	3.213.625.000	
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				3.052.838.500		3.026.518.500		3.088.047.000		3.166.421.000		3.252.515.000		3.364.531.000	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 laporan	1 laporan	3.052.838.500	1 laporan	3.026.518.500	1 laporan	3.088.047.000	1 laporan	3.166.421.000	1 laporan	3.252.515.000	1 laporan	3.364.531.000	
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				6.251.467.200		5.220.965.976		5.327.108.000		5.462.310.000		5.610.830.000		5.804.066.000	

Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	41 perangkat daerah	6.251.467.200	41 perangkat daerah	5.220.965.976	41 perangkat daerah	5.327.108.000	41 perangkat daerah	5.462.310.000	41 perangkat daerah	5.610.830.000	41 perangkat daerah	5.804.066.000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				380.079.000		368.419.000		375.911.000		385.450.000		395.928.000		409.562.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				380.079.000		368.419.000		375.911.000		385.450.000		395.928.000		409.562.000	
Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik	14.29 persen	18.37 persen	376.149.000	22.45 persen	137.790.000	26.53 persen	140.592.000	30.61 persen	144.159.000	34.69 persen	148.077.000	40.82 persen	153.176.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				380.079.000		368.419.000		375.911.000		385.450.000		395.928.000		409.562.000	
Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD	Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat	-	10 OPD	376.149.000	15 OPD	137.790.000	20 OPD	140.592.000	25 OPD	144.159.000	30 OPD	148.077.000	30 OPD	153.176.000	
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				373.389.000		134.490.000		137.225.000		140.707.000		144.532.000		149.509.000	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	-	-	373.389.000	100 persen	134.490.000	100 persen	137.225.000	100 persen	140.707.000	100 persen	144.532.000	100 persen	149.509.000	
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				2.760.000		3.300.000		3.367.000		3.452.000		3.545.000		3.667.000	

Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-	2.760.000	100 persen	3.300.000	100 persen	3.367.000	100 persen	3.452.000	100 persen	3.545.000,00	100 persen	3.667.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	-	100 persen	3.930.000	100 persen	230.629.000	100 persen	235.319.000	100 persen	241.291.000	100 persen	247.851.000	100 persen	256.386.000	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				380.079.000		368.419.000		375.911.000		385.450.000		395.928.000		409.562.000	
Meningkatnya Penerapan Prinsip Satu Data	Persentase keterisian daftar data statistik sektoral	-	80,00 persen	3.930.000	83,90 persen	230.629.000	87,80 persen	235.319.000	91,80 persen	241.291.000	95,70 persen	247.851.000	100 persen	256.386.000	
	Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	-	10 layanan		10 layanan		10 layanan		10 layanan		10 layanan		10 layanan		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				3.930.000		230.629.000		235.319.000		241.291.000		247.851.000		256.386.000	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	50 persen	3.930.000	50 persen	230.629.000	50 persen	235.319.000	50 persen	241.291.000	50 persen	247.851.000	50 persen	256.386.000	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.364.680.088		1.535.972.632		1.567.212.000		1.606.987.000		1.650.679.000		1.707.511.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.364.680.088		1.535.972.632		1.567.212.000		1.606.987.000		1.650.679.000		1.707.511.000	

Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi	Nilai Keamanan Informasi	87.80 nilai	88.00 nilai	1.364.680.088	89.00 nilai	1.535.972.632	90.00 nilai	1.567.212.000	91.00 nilai	1.606.987.000	92.00 nilai	1.650.679.000	93.00 nilai	1.707.511.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				454.848.000		454.848.000		464.098.000		475.876.000		488.814.000		505.643.000	
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi	10 aplikasi	10 aplikasi	277.938.000	10 aplikasi	454.848.000	10 aplikasi	464.098.000	10 aplikasi	475.876.000	10 aplikasi	488.814.000	10 aplikasi	505.643.000	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				265.300.000		445.810.000		454.877.000		466.421.000		479.102.000		495.597.000	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan	12 laporan	265.300.000	12 laporan	445.810.000	12 laporan	454.877.000	12 laporan	466.421.000	12 laporan	479.102.000	12 laporan	495.597.000	
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				12.638.000		9.038.000		9.221.000		9.455.000		9.712.000		10.046.000	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	1 perangkat daerah		12.638.000	1 perangkat daerah	9.038.000	1 perangkat daerah	9.221.000	1 perangkat daerah	9.455.000	1 perangkat daerah	9.712.000	1 perangkat daerah	10.046.000	

2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1.086.742.088		1.081.124.632		1.103.114.000		1.131.111.000		1.161.865.000		1.201.868.000	
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase JKS yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta	-	100 persen	1.086.742.088	100 persen	1.081.124.632	100 persen	1.103.114.000	100 persen	1.131.111.000	100 persen	1.161.865.000	100 persen	1.201.868.000	
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				1.086.742.088		1.081.124.632		1.103.114.000		1.131.111.000		1.161.865.000		1.201.868.000	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	-		1.086.742.088	4 kegiatan	1.081.124.632	4 kegiatan	1.103.114.000	4 kegiatan	1.131.111.000	4 kegiatan	1.161.865.000	4 kegiatan	1.201.868.000	

4.2. PROGRAM KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaran Program Prioritas RPJMD 2025-2029 merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas Kepala daerah RPJMD 2025-2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu, melalui program prioritas:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b. Program Aplikasi Informatika
c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
d. Program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta keterkaitan dengan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Daftar program kegiatan yang mendukung program prioritas kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian			
1.1	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Relasi Media	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Penyusunan Konten	
			Meningkatnya OPD dengan kategori informatif	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Pelayanan Informasi Publik	

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1.2	Satu Kampung Satu Bidan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kebijakan dan Layanan SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Penyediaan Akses Internet	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya Manajemen SPBE	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
1.3	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

No	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1.4	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.3. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran **R**encana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dalam periode 2025-2029 sangat bergantung pada pemantauan, pengukuran, dan evaluasi yang jelas menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dapat tercapai. Dengan menggunakan IKU yang terukur, perangkat daerah dapat mengarahkan kebijakan, program, dan aktivitas mereka untuk mencapai hasil yang optimal

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	Persen	70,82	70,82	73,34	75,61	77,11	78,75	79,75	IKU
1.1	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90	92	93	94	95	96	97	IKU
1.2	Indeks SPBE	Nilai	3,5	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,55	IKU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,85	2,85	3	3	3,1	3,1	3,2	IKU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
1.4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	592	590	600	605	610	615	615	IKU

4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu cara untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan dan program pemerintahan daerah tercapai.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	IKK
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	IKK
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	63,58	65,63	67,68	69,73	71,78	73,84	75,89	IKK
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	IKK
5	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	IKK
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	91,78	64,27	65,36	65,90	66,45	66,99	67,54	IKK

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis rencana pembangunan yang mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan program prioritas Kepala Daerah, yang ditunjukkan pada Visi pembangunan Kota Yogyakarta sesuai RPJMD yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban."

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kunci (IKU). Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk jangka waktu tahun 2025- 2029 dan pencapaian rencana pembangunan Kota Yogyakarta.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2025-2029, diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban serta memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA YOGYAKARTA

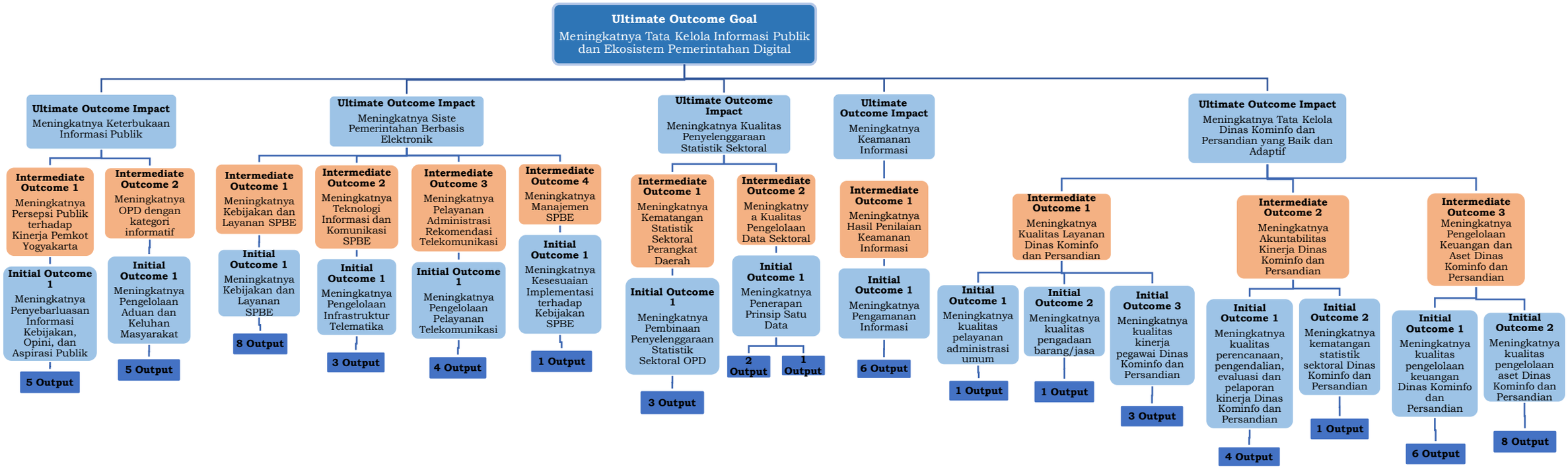

Cross Cutting IO	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
Bag. Hukum, Organisasi, BAPPEDA, BKPSDM, Inspektorat, BPKAD	Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Evidence SBBE
BKPSDM	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM TI
DPUPKP, BPKAD, DPMTSP, DISPETARU, SATPOL PP, Bag. Kerjasama	Meningkatnya penglolaan infrastruktur pasif telekomunikasi ducting
Inspektorat	Terlaksananya Audit TIK (Audit aplikasi SPBE, Audit infrastruktur SPBE, Audit keamanan SPBE)
BKPSDM	Tersedianya SDM yang Kompeten
Inspektorat	Terlaksananya Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Cross Cutting Internal	
Nama OPD	**Dukungan Kegiatan**
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipa

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA YOGYAKARTA

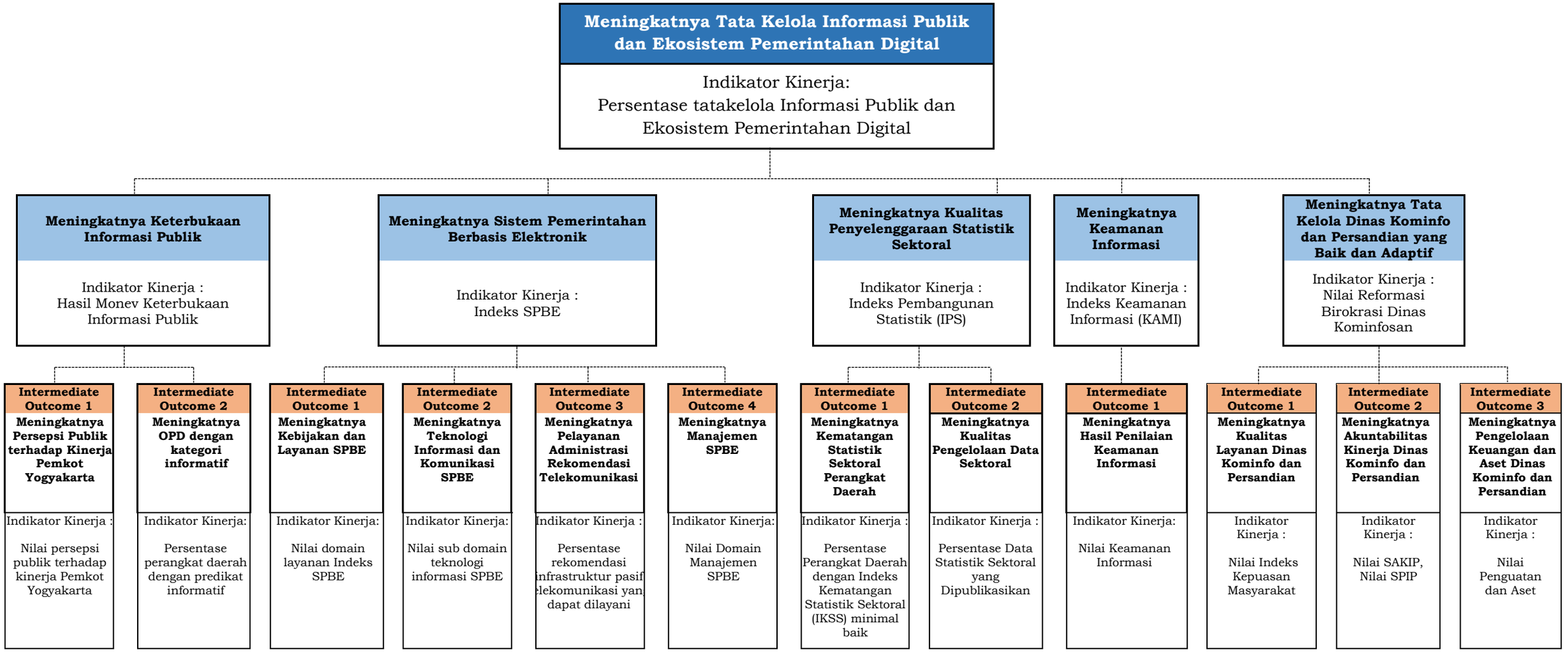

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja :
Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

Intermediate Outcome 1

Meningkatnya Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta

Indikator Kinerja :
Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta

Initial Outcome 1

Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Indikator Kinerja :
1. Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital

Output 1

Terlaksananya Analisis Media

Indikator Kinerja :
Jumlah konten tindak lanjut respon isu dari monitoring analisis media

Output 2

Terlaksananya Relasi Media

Indikator Kinerja :
Jumlah aktivitas relasi media

Output 3

Terlaksananya Survey Persepsi terhadap Kinerja Pemkot

Indikator Kinerja :
Tersampaikannya laporan akhir Survei Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Perangkat Daerah

Output 4

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah aktivitas pengelolaan media komunikasi publik

Output 5

Terlaksananya Penyusunan Konten

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Konten Informasi Publik
2. Jumlah konten untuk menanggapi isu-isu publik

Intermediate Outcome 2

Meningkatnya OPD dengan kategori informatif

Indikator Kinerja :
Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif

Initial Outcome 1

Meningkatnya Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat

Indikator Kinerja :
Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP

Output 1

Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Indikator Kinerja :
Jumlah komunitas yang menerima diseminasi informasi dari Dinas Kominfosan

Output 2

Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Output 3

Terlaksananya Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja :
Laporan Tahunan PPID

Output 4

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aduan dan keluhan masyarakat

Output 5

Terlaksananya Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Kota

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan walikota menyapa

Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja :
Indeks SPBE

Intermediate Outcome 1

Meningkatnya Kebijakan dan Layanan SPBE

Indikator Kinerja :
Nilai domain layanan Indeks SPBE

Initial Outcome 1

Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator Kinerja :
Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan

Output 1

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Aplikasi Layanan Elektronik

Indikator Kinerja :
Jumlah aplikasi layanan elektronik yang dibangun

Output 2

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi OPD Pengampu Layanan Elektronik

Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang dievaluasi

Output 3

Terlaksananya Pemeliharaan Layanan Aplikasi

Indikator Kinerja :
Jumlah layanan elektronik yang terpelihara/dikembangkan

Output 4

Terlaksananya Layanan Konsultasi Aplikasi Layanan Elektronik

Indikator Kinerja :
Jumlah konsultasi yang dilayani

Output 5

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE

Output 6

Terlaksananya Pengumpulan Evidence Indikator SPBE

Indikator Kinerja :
Laporan pemenuhan evidence indikator SPBE

Output 7

Terlaksananya Koordinasi SPBE Antara OPD

Indikator Kinerja :
Rapat koordinasi/FGD Tim SPBE

Output 8

Terlaksananya Pendataan OPD yang Memiliki Evidece SPBE

Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yg memiliki evidence SPBE

Intermediate Outcome 2

Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

Indikator Kinerja :
Nilai sub domain teknologi informasi SPBE

Initial Outcome 1

Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Telematika

Indikator Kinerja :
Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik

Output 1

Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat Data

Indikator Kinerja :
Jumlah kapasitas sumber daya pusat data

Output 2

Terlaksananya Pengelolaan Intranet dan Internet

Indikator Kinerja :
Jumlah perangkat jaringan yang diperbarui

Output 3

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan

Indikator Kinerja :
Laporan jumlah pemeliharaan intranet dan internet

Intermediate Outcome 3

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi

Indikator Kinerja :
Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani

Initial Outcome 1

Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi

Indikator Kinerja :
Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar

Output 1

Terlaksananya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Fiber Optik

Indikator Kinerja :
Jumlah/panjang jaringan fiber optik yang terawasi dan terkendali

Output 2

Terlaksananya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Indikator Kinerja :
Jumlah menara komunikasi yang terawasi dan terkendali

Output 3

Meningkatnya Pengelolaan Ekosistem Digital

Indikator Kinerja :
Laporan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan ekosistem digital

Output 4

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Literasi Digital Bagi Masyarakat

Indikator Kinerja :
Jumlah kegiatan berdasarkan laporan penyelenggaraan kegiatan

Intermediate Outcome 4

Meningkatnya Manajemen SPBE

Indikator Kinerja :
Nilai Domain Manajemen SPBE

Initial Outcome 1

Meningkatnya Kesesuaian Implementasi terhadap Kebijakan SPBE

Indikator Kinerja :
Tingkat Kematangan Audit TIK

Output 1

Terlaksananya Audit TIK

Indikator Kinerja :
Laporan Hasil Audit TIK

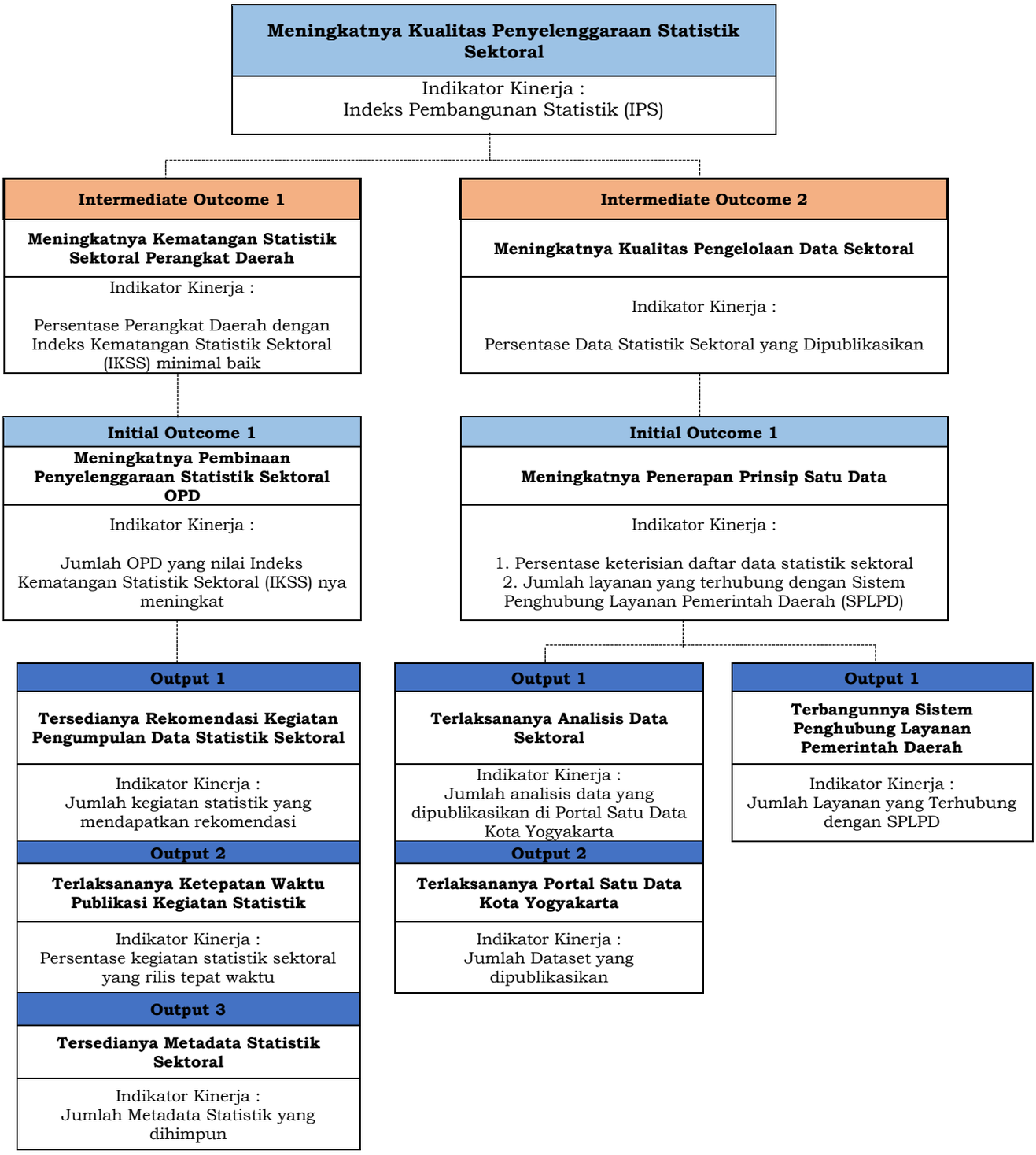
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Indikator Kinerja :
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Intermediate Outcome 1
Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah
Indikator Kinerja :
Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik
Intermediate Outcome 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral
Indikator Kinerja :
Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan
Initial Outcome 1
Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat
Initial Outcome 1
Meningkatnya Penerapan Prinsip Satu Data
Indikator Kinerja :
1. Persentase keterisian daftar data statistik sektoral
2. Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
Output 1
Tersedianya Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Indikator Kinerja :
Jumlah kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi
Output 2
Terlaksananya Ketepatan Waktu Publikasi Kegiatan Statistik
Indikator Kinerja :
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
Output 3
Tersedianya Metadata Statistik Sektoral
Indikator Kinerja :
Jumlah Metadata Statistik yang dihimpun
Output 1
Terlaksananya Analisis Data Sektoral
Indikator Kinerja :
Jumlah analisis data yang dipublikasikan di Portal Satu Data Kota Yogyakarta
Output 2
Terlaksananya Portal Satu Data Kota Yogyakarta
Indikator Kinerja :
Jumlah Dataset yang dipublikasikan
Output 1
Terbangunnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah Layanan yang Terhubung dengan SPLPD

Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator Kinerja :
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Intermediate Outcome 1

Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi

Indikator Kinerja :
Nilai Keamanan Informasi

Initial Outcome 1

Meningkatnya Pengamanan Informasi

Indikator Kinerja :

1. Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi
2. Persentase JKS yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta

Output 1

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Penerapan Keamanan Informasi dengan Pengujian Keamanan Informasi

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan pengujian keamanan informasi

Output 2

Terlaksananya Kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber (jogjakota CSIRT)

Indikator Kinerja :
Jumlah penanganan insiden siber

Output 3

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Mail Server Pemerintah Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja :
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan monitoring mail server

Output 4

Terlaksananya Kegiatan Literasi Keamanan Informasi di Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja :
Jumlah kegiatan literasi keamanan informasi

Output 5

Terlaksananya Sterilisasi Ruangan VVIP

Indikator Kinerja :
Jumlah ruangan yang disterilisasi

Output 6

Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah kegiatan berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah

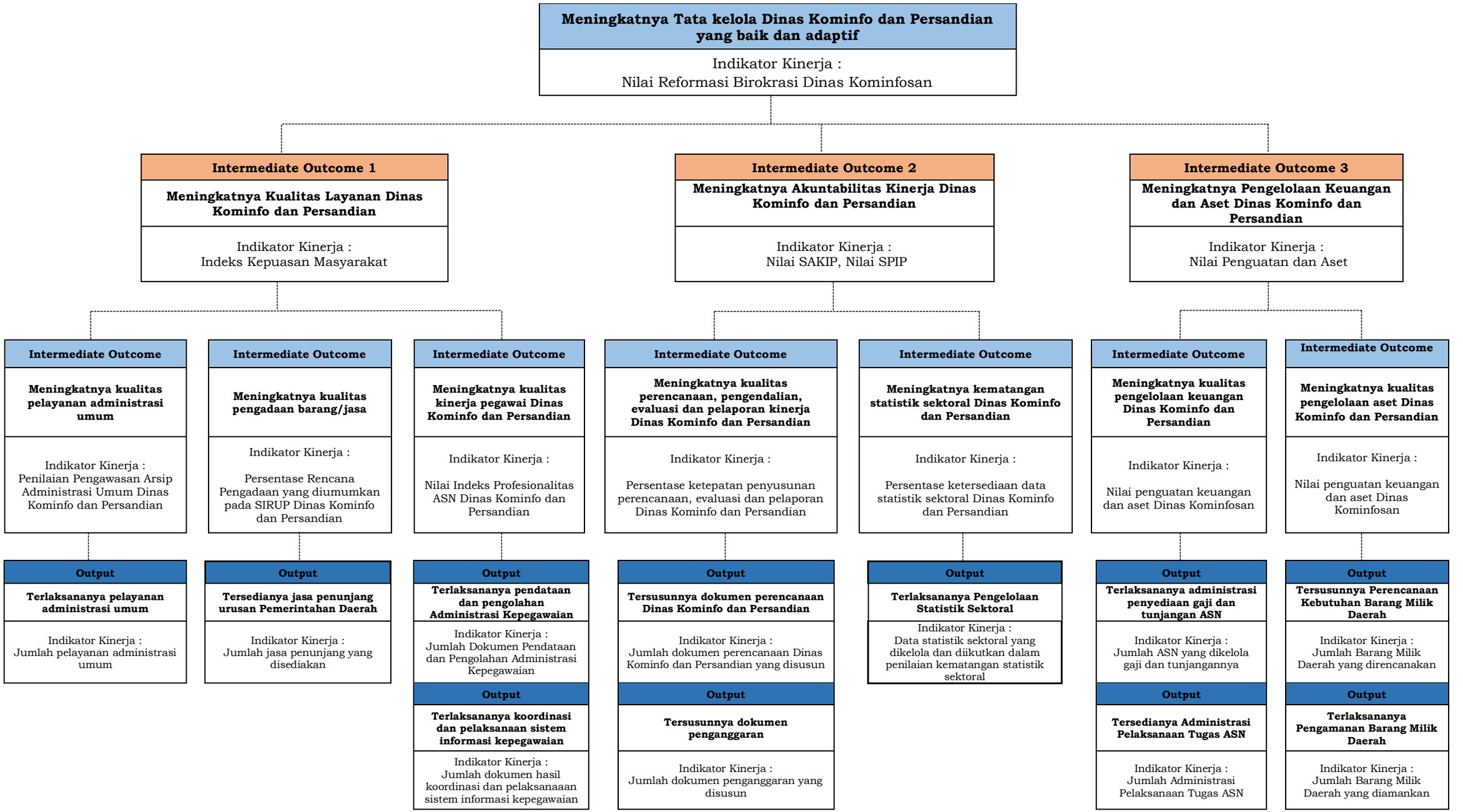
Meningkatnya Tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif
Indikator Kinerja :
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan
Intermediate Outcome 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan Masyarakat
Intermediate Outcome 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Nilai SAKIP, Nilai SPIP
Intermediate Outcome 3
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Nilai Penguatan dan Aset
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum
Indikator Kinerja :
Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa
Indikator Kinerja :
Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian
Intermediate Outcome
Meningkatnya kematangan statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan
Output
Terlaksananya pelayanan administrasi umum
Indikator Kinerja :
Jumlah pelayanan administrasi umum
Output
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah jasa penunjang yang disediakan
Output
Terlaksananya pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Output
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaaan sistem informasi kepegawaian
Output
Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kominfo dan Persandian yang disusun
Output
Tersusunnya dokumen penganggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen penganggaran yang disusun
Output
Terlaksananya Pengelolaan Statistik Sektoral
Indikator Kinerja :
Data statistik sektoral yang dikelola dan diikutkan dalam penilaian kematangan statistik sektoral
Output
Terlaksananya administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Indikator Kinerja :
Jumlah ASN yang dikelola gaji dan tunjangannya
Output
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Kinerja :
Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Output
Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan
Output
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan

Output
Terlaksananya monev penilaian kinerja pegawai
Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang dimonev

Output
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja : Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun
Output
Terlaksananya monev kinerja Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja : Jumlah monev yang dilaksanakan

Output
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan
Output
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Kinerja : Jumlah akuntansi Dinas Kominfosan yang terlaksana
Output
Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian
Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan Diskominfosan yang disusun
Output
Terkelolanya Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Indikator Kinerja : Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola

Output
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai
Output
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara tepat waktu
Indikator Kinerja : Jumlah lapora Barang Milik Daerah yang disusun
Output
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah
Output
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Secara Optimal
Indikator Kinerja : Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan
Output
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan
Output
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

CASCADING KINERJA

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta	Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	Hasil Survey Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya OPD dengan kategori informatif	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	(Jumlah perangkat daerah dengan predikat informatif dibagi jumlah seluruh perangkat daerah) x 100%	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
		1.2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE Oleh Kementrian PAN-RB	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kebijakan dan Layanan SPBE	Nilai domain layanan Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE Oleh Kementrian PAN-RB pada Domain Layanan SPBE	Bidang Sistem Informasi dan Statistik
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Nilai sub domain teknologi informasi SPBE	Hasil penilaian sub domain teknologi informasi SPBE	Bidang Infrastruktur Telematika

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi	Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani	(Jumlah rekomendasi ijin infrastruktur pasif yang dilayani dibagi jumlah permohonan permohonan rekomendasi ijin infrastruktur pasif) x 100%	Bidang Persandian dan Telekomunikasi
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Manajemen SPBE	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN_RB pada Domain Manajemen SPBE	Bidang Persandian dan Telekomunikasi
		1.3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai IPS hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPS Pusat	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik	(Jumlah OPD dengan nilai IKSS predikat Baik yang dinilai oleh BPS Kota Yogyakarta dibagi Jumlah OPD yang dinilai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta) x 100%	Bidang Sistem Informasi dan Statistik

No	Nama Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	(Data sektoral yang terpublikasi / data sektoral yang terverifikas)i x 100%	Bidang Sistem Informasi dan Statistik
		1.4. Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI berdasarkan hasil verifikasi Badan Siber dan Sandi Negara	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi	Nilai Keamanan Informasi	Nilai evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi	Bidang Persandian dan Telekomunikasi
		1.5. Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kominfosan	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
							Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Sekretariat
							Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1. Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	1. Jumlah pemberitaan positif dan netral (analisis media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak x 100%	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Media	Jumlah konten tindak lanjut respon isu dari monitoring analisis media	Tim Kerja Pengelolaan Informasi
							Terlaksananya Survey Persepsi terhadap Kinerja Pemkot	Tersampaikannya laporan akhir Survei Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Perangkat Daerah	Tim Kerja Pengelolaan Informasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
		2. Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital	2. Jumlah konten yang diproduksi dibagi jumlah rencana produksi konten x 100%	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media	Tim Kerja Humas dan Publikasi
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah aktivitas pengelolaan media komunikasi publik	Tim Kerja Humas dan Publikasi
					Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Konten	1. Jumlah Konten Informasi Publik 2. Jumlah konten	Tim Kerja Humas dan Publikasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
								untuk menanggapi isu-isu publik	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat	Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP	Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 1 x 24 jam dibagi total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi x 100%	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas yang menerima diseminasi informasi dari Dinas Kominfosan	Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan
							Terlaksananya Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Tahunan PPID	Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aduan dan Keluhan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aduan dan keluhan masyarakat	Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan
							Terlaksananya Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Kota	Jumlah pelaksanaan walikota menyapa	Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan	Jumlah aplikasi layanan elektronik terintegrasi yang dikembangkan	Bidang Sistem Informasi dan Statistik	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Tim Kerja Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi
							Terlaksananya Kegiatan Evaluasi OPD Pengampu Layanan Elektronik	Jumlah OPD yang dievaluasi	Tim Kerja Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
							Terlaksananya Pengumpulan Evidence Indikator SPBE	Laporan pemenuhan evidence indikator SPBE	Tim Kerja Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi
							Terlaksananya Koordinasi SPBE Antara OPD	Rapat koordinasi/ FGD Tim SPBE	Tim Kerja Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi
							Terlaksananya Pendataan OPD yang Memiliki Evidece SPBE	Jumlah OPD yang memiliki evidence SPBE	Tim Kerja Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi
					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Aplikasi Layanan Elektronik	Jumlah aplikasi layanan elektronik yang dibangun	Tim Kerja Pengembangan Perangkat Lunak

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Aplikasi Umum SPBE	dan pengembangan aplikasi SPBE			
							Terlaksananya Pemeliharaan Layanan Aplikasi	Jumlah layanan elektronik yang terpelihara/ dikembangkan	Tim Kerja Pengembangan Perangkat Lunak
							Terlaksananya Layanan Konsultasi Aplikasi Layanan Elektronik	Jumlah konsultasi yang dilayani	Tim Kerja Pengembangan Perangkat Lunak
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Telematika	Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik	Jumlah aplikasi yang dihosting di pusat data	Bidang Infrastruktur Telematika	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat Data	Jumlah kapasitas sumber daya pusat data	Tim Kerja Infrastruktur Pusat Data
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan	Laporan jumlah pemeliharaan intranet dan internet	Tim Kerja Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
						Pemerintah Daerah Kab/Kota			
					Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Terlaksananya Pengelolaan Intranet dan Internet	Jumlah perangkat jaringan yang diperbarui	Tim Kerja Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar	(Jumlah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah memiliki rekomendasi dibagi jumlah total Infrastruktur Pasif Telekomunikasi) x 100%	Bidang Persandian dan Telekomunikasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integras layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Fiber Optik	Jumlah/pan jang jaringan fiber optik yang terawasi dan terkendali	Tim Kerja Pengawasan Pengendalian Persandian dan Telematika
							Terlaksananya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomuni kasi	Jumlah menara komunikasi yang terawasi dan terkendali	Tim Kerja Pengawasan Pengendalian Persandian dan Telematika

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Meningkatnya Pengelolaan Ekosistem Digital	Laporan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan ekosistem digital	Tim Kerja Operasional Persandian Dan Telekomunikasi
							Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Literasi Digital Bagi Masyarakat	Jumlah kegiatan berdasarkan laporan penyelenggaraan kegiatan	Tim Kerja Operasional Persandian Dan Telekomunikasi
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kesesuaian Implementasi terhadap Kebijakan SPBE	Tingkat Kematangan Audit TIK	Jumlah nilai tingkat kematangan pelaksanaan Kebijakan Internal Audit TIK, Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE dalam Audit TIK	Bidang Persandian dan Telekomunikasi	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokume Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Audit TIK	Laporan Hasil Audit TIK	Tim Kerja Pengamanan Informasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD	Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat	Jumlah OPD yang mengalami kenaikan nilai IKSS yang dinilai oleh BPS Kota Yogyakarta	Bidang Sistem Informasi dan Statistik	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Terlaksananya Ketepatan Waktu Publikasi Kegiatan Statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Tim Kerja Data dan Statistik
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Tersedianya Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi	Tim Kerja Data dan Statistik
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penerapan Prinsip Satu Data	Persentase keterisian daftar data statistik sektoral	(Jumlah isian daftar data yang terisi dibagi Jumlah Daftar Data Yang harus diisi) x 100%	Bidang Sistem Informasi dan Statistik	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik yang dihimpun	Tim Kerja Data dan Statistik

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
		Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Integrasi layanan dengan menggunakan SPLPD	Bidang Sistem Informasi dan Statistik			Terlaksananya Portal Satu Data Kota Yogyakarta	Jumlah Dataset yang dipublikasikan	Tim Kerja Data dan Statistik
							Terlaksananya Analisis Data Sektoral	Jumlah Dataset yang dipublikasikan	Tim Kerja Data dan Statistik
							Terbangunnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan yang Terhubung dengan SPLPD	Tim Kerja Data dan Statistik
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi	(Jumlah aplikasi yang telah dilakukan pentest / jumlah aplikasi yang diajukan untuk pentest) x 100%	Bidang Persandian dan Telekomunikasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya peningkatan kualitas penerapan keamanan informasi dengan pengujian keamanan informasi	Jumlah pelaksanaan pengujian keamanan informasi	Tim Kerja Pengamanan Informasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
							Terlaksananya Kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber (jogjakota CSIRT)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan monitoring	Tim Kerja Pengamanan Informasi
							Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Mail Server Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah penanganan insiden siber	Tim Kerja Pengamanan Informasi
							Terlaksananya Kegiatan Literasi Keamanan Informasi di Kota Yogyakarta	Jumlah kegiatan literasi keamanan informasi	Tim Kerja Pengamanan Informasi
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Terlaksananya Sterilisasi Ruangan VVIP	Jumlah ruangan yang disterilisasi	Tim Kerja Pengawasan Pengendalian Persandian Dan Telematika

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengamanan informasi	Persentase JKS yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta	(Jumlah operator JKS / jumlah OPD Pemkot Yogyakarta) x 100%	Bidang Persandian dan Telekomunikasi	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	Tim Kerja Operasional Persandian Dan Telekomunikasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Diskominfo yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Diskominfo yang wajib disusun	Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kominfo dan Persandian yang disusun	Tim Kerja PEP
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Tersusunnya dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggara	Tim Kerja PEP

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
		Kominfo dan Persandian	Dinas Kominfo dan Persandian			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		n yang disusun	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	Tim Kerja PEP
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	Tim Kerja PEP
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	Tim Kerja PEP

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Tim Kerja PEP
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monev kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah monev yang dilaksanakan	Tim Kerja PEP
							Terlaksananya Pengelolaan Statistik Sektoral	Data statistik sektoral yang dikelola dan diikutkan dalam penilaian kematangan	Tim Kerja PEP

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
								statistik sektoral	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian oleh BPKAD	Sekretariat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dikelola gaji dan tunjangannya	Sub Bagian Keuangan
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub Bagian Keuangan
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	Sub Bagian Keuangan
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah akuntansi Dinas Kominfosan yang terlaksana	Sub Bagian Keuangan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah laporan keuangan Diskominfosan yang disusun	Sub Bagian Keuangan
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola	Sub Bagian Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah laporan keuangan Diskominfosan yang disusun	Sub Bagian Keuangan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah laporan keuangan Diskominfosan yang disusun	Sub Bagian Keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian oleh BPKAD	Sekretariat	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara tepat waktu	Jumlah lapora Barang Milik Daerah yang disusun	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaaan sistem informasi kepegawaian	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monev penilaian kinerja pegawai	Jumlah pegawai yang dimonev	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian oleh BPKAD	Sekretariat	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian	Jumlah belanja Dinas Kominfo dan Persandian yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinas Kominfo dan Persandian dikali 100%	Sekretariat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
						Umum Kantor yang Disediakan	Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo dan Persandian	Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kominfo dan Persandian oleh BPKAD	Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Operasional (Output)	Indikator Kinerja	Pengampu
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM
Kota Yogyakarta

perinkopukm.jogja.official perinkopukm.jogjakota.go.id dinas perindustrian koperasi ukm kota jogja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun.

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sempurna. Oleh karenanya, terbuka kesempatan untuk melakukan perbaikan di kemudian hari, dengan mengakomodir masukan dan koreksi dari berbagai pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, September 2025

Kepala

Drs. Tri Karyadi Riyanto R, SH., MSi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah II-6
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-17
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah II-40
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan II-41
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah II-42
2.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah II-42
2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-44
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-62
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah III-62
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran III-64
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-69
4.1 Program Perangkat Daerah IV-69
4.2 Uraian Kegiatan IV-70
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif IV-72
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioitas Pembangunan Daerah 104
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 –..... IV-106
BAB V. PENUTUP V-106

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta II-9
Tabel 2.2 Daftar Inventaris Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-18
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Program Tahun 2020 – 2024 ..... II-19
Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah II-45
Tabel 2.6 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah II-61
Tabel 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH III-62
Tabel 3.2 Penahapan Renstra IV-66
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah IV-68
Tabel 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA IV-73
Tabel 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA IV-75
Tabel 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN IV-82
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-104
Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD IV-105
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci IV-106

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta.....II-8
Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi UPT Logam II-8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota. Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis mengingat merupakan manifestasi dukungan terhadap kontrak politik Walikota Yogyakarta yang sistematis. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan target indukator kinerja yang harus dicapai Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS). Penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029. Rumusan tersebut memuat:
   a. Gambaran pelayanan PD;
   b. Perumusan masalah dan isu strategis
   c. Perumusan tujuan dan sasaran
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
   e. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Forum OPD Renstra
4. Verifikasi Rancangan Renstra PD
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029
6. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029
7. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra
8. Penetapan Renstra Tahun 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunan dokumen ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yogyakarta 2025 – 2029 dari aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kagiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025 – 2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025 – 2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 (lima) tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, lembaga ini mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis, yakni UPT Logam. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, UPT Logam memiliki tugas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industri logam dan PDIN (Pusat Desain Industri Nasional). Untuk melaksanakan

tugas tersebut, UPT Logam menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan petunjuk teknis pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industri logam dan desain industri;
2. Pelaksanaan riset, pembinaan, pelayanan dan fasilitasi teknis di bidang desain industri dan industri logam;
3. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan pemenuhan rantai pasok industri nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang industri manufaktur, pengembangan desain industri;
4. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Industri, terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Koperasi, terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Usaha Mikro Kecil, terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
   a. Kepala UPT;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi dinas dan UPT Logam tertera sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.3 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

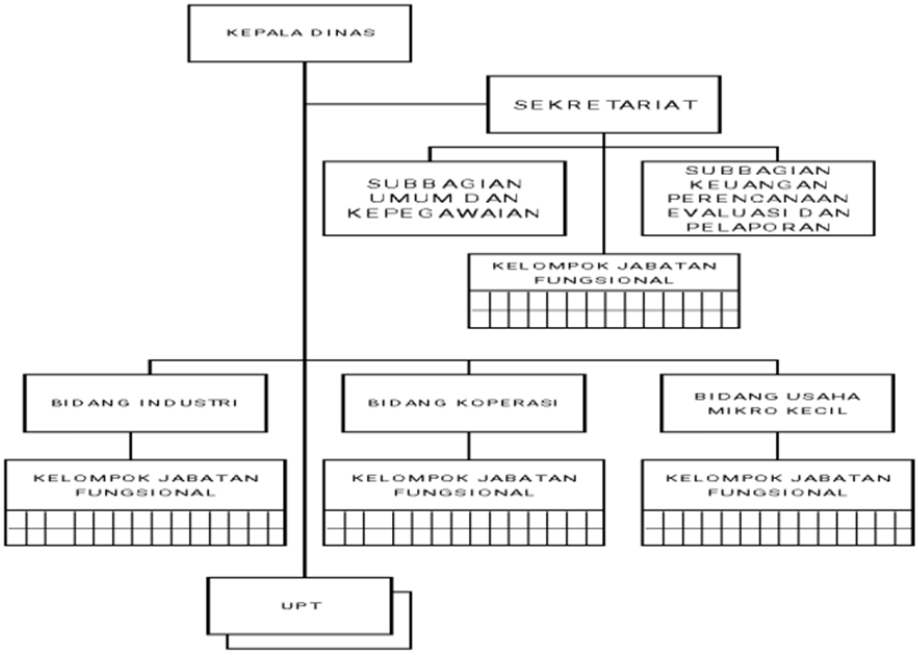

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi UPT Logam

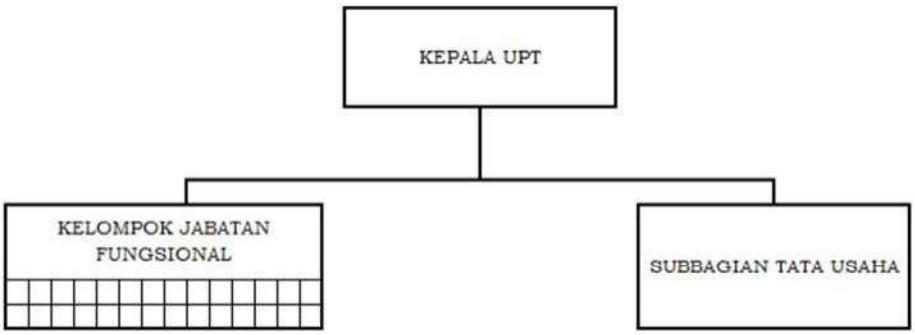

Sumber: Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

sumber: Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

1. Sumber daya Pegawai

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogykarta sebanyak 35 (tiga puluh dua) orang, terbagi atas 31 orang PNS dan 4 orang PPPK. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah berdasarkan jabatan struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ditunjukkan Tabel 2.1 Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta adalah JFU sebanyak 15 orang (42,85%), Eselon IV sebanyak 4 orang (11,42%), JFT sebanyak 2 orang (34,28%), dan Eselon III sebanyak 3 orang (8,57%), dan Eselon II sebanyak 1 orang (2,85%).

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Uraian	JFU	JFT	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
Sekretariat	8	0	1	1	2	**11**
Bidang Koperasi	1	3	0	1	0	**5**
Bidang Usaha Mikro	1	2	0	1	0	**4**
Bidang Industri	0	7	0	0	0	**7**
UPT Logam	5	0	0	0	2	**6**
Jumlah	**15**	**12**	**1**	**3**	**4**	**35**

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Juni 2025

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Secara umum sarana prasarana Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta cukup memadai, terutama sarana prasarana pokok seperti meja kerja, komputer dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yang tersedia di tiga unit bangunan kantor yakni Dinas, UPT Logam dan PDIN.

Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Semua komputer dan Laptop tersambung jaringan internet. Tersedia 1unit kendaraan dinas roda 4 bagi Kepala Dinas dan semua pejabat eselon III (sekretaris dan kepala bidang). Untuk pejabat eselon IV, tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 2 per orang. Secara rinci sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tersaji pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Daftar Inventaris Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Lokasi
1	A.C. Split	10	DPKU
2	A.C. Split	10	UPT LOGAM
3	Adjustable Wrench 6 (Kunci Inggris)	1	UPT LOGAM
4	ADV cnc router	1	UPT LOGAM
5	Air Compresor	4	UPT LOGAM
6	Air orbital palm sander	5	UPT LOGAM
7	Airbrush kit	10	UPT LOGAM
8	Alat Dapur	3	DPKU
9	Alat Pendingin	1	DPKU
10	Alat Pengukur Waktu	1	DPKU
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4	DPKU
12	Alat Ukur/ Pembanding	15	UPT LOGAM
13	Bak Air	1	DPKU
14	Bak Celup	3	UPT LOGAM
15	Band saw	1	UPT LOGAM
16	Bangku Tunggu	1	DPKU
17	Batch Vacuum Filter	1	UPT LOGAM
18	Blok Simetri Putar	1	UPT LOGAM
19	Brandkas	2	DPKU
20	Brandkas	1	UPT LOGAM
21	Camera Electronic	1	DPKU
22	Capacity Die Casting	63	UPT LOGAM
23	CCTV	1	UPT LOGAM
24	Chisel mortisel	1	UPT LOGAM
25	Clipp On	1	DPKU

26	Cnc	13	UPT LOGAM
27	Cnc - Lathe	2	UPT LOGAM
28	CNC Laser Wood Carving	1	UPT LOGAM
29	Cnc Milling Machine	174	UPT LOGAM
30	Complete mechanic tool set	51	UPT LOGAM
31	Compressed Natural Gas (CNG) Conversion Kit	11	UPT LOGAM
32	Converntion Lathe	3	UPT LOGAM
33	Cut off machine	3	UPT LOGAM
34	Dial & Test Indikator	1	UPT LOGAM
35	Dial & Test Indikator	2	UPT LOGAM
36	Dispenser	2	DPKU
37	Dry Cabinet Box Camera (Dry Box Kamera)	1	UPT LOGAM
38	Drying Booth	1	UPT LOGAM
39	Electric pipe bender machine	2	UPT LOGAM
40	Electrical Discharge	1	UPT LOGAM
41	Electrostatic powder coating	1	UPT LOGAM
42	English whell manual	2	UPT LOGAM
43	Face Shield (From Radiant Heat Spork)	4	UPT LOGAM
44	Facsimile	1	DPKU
45	Filing Cabinet Besi	23	DPKU
46	Filing Cabinet Besi	4	UPT LOGAM
47	Finger joint laminated	1	UPT LOGAM
48	Floor Crane	1	UPT LOGAM
49	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	UPT LOGAM
50	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	DPKU
51	Forklift	1	UPT LOGAM
52	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	DPKU
53	Gergaji	4	UPT LOGAM
54	Glossmeter	4	UPT LOGAM
55	Ground Parallels VP-128A (Paralel Block)	2	UPT LOGAM
56	Hand pallet	2	UPT LOGAM
57	High pressure cleaner	8	UPT LOGAM
58	Holder	2	UPT LOGAM
59	Jam Elektronik	3	DPKU
60	Jewellery work station	11	UPT LOGAM

61	Jig saw	5	UPT LOGAM
62	Ketam	1	UPT LOGAM

63	Kipas Angin	1	DPKU
64	Komputer CAD/CAE	4	UPT LOGAM
65	Kunci Pas	3	UPT LOGAM
66	Kursi Besi/Metal	28	UPT LOGAM
67	Kursi Kayu	6	DPKU
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	DPKU
69	Kursi Lipat	18	DPKU
70	Kursi Putar	20	DPKU
71	Kursi Putar	88	UPT LOGAM
72	Kursi Rapat	82	DPKU
73	Kursi Rapat	36	UPT LOGAM
74	Kursi Tamu	4	DPKU
75	Lap Top	2	DPKU
76	Lap Top	11	UPT LOGAM
77	Laser Cutting Grafir	1	UPT LOGAM
78	Lathe machine	4	UPT LOGAM
79	LCD Projector/Infocus	1	DPKU
80	LCD Projector/Infocus	2	UPT LOGAM
81	Lemari Besi/Metal	17	DPKU
82	Lemari Besi/Metal	5	UPT LOGAM
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	DPKU
84	Lemari Es	3	DPKU
85	Lemari Kayu	3	DPKU
86	Lemari Kayu	30	UPT LOGAM
87	Lemari Kayu	2	UPT LOGAM
88	Lemari Penyimpan	3	UPT LOGAM
89	Lemari Sorok	1	UPT LOGAM
90	Magnetic Particle (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2	UPT LOGAM
91	Meja 1/2 Biro	39	DPKU
92	Meja 1/2 Biro	15	UPT LOGAM
93	Meja Kerja Besi/Metal	4	DPKU
94	Meja Kerja Besi/Metal	22	UPT LOGAM

95	Meja Kerja Kayu	98	UPT LOGAM
96	Meja Komputer	6	DPKU

97	Meja Komputer	2	UPT LOGAM
98	Meja Rapat	30	DPKU
99	Meja Rapat	12	UPT LOGAM
100	Meja Resepsionis	1	UPT LOGAM
101	Mesin Amplas Plat	1	UPT LOGAM
102	Mesin Bor	3	UPT LOGAM
103	Mesin Bor Tangan	4	UPT LOGAM
104	Mesin Bubut	109	UPT LOGAM
105	Mesin Bubut	4	UPT LOGAM
106	Mesin CNC	1	UPT LOGAM
107	Mesin Gerinda	2	UPT LOGAM
108	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	2	UPT LOGAM
109	Mesin Gerinda Tangan	1	UPT LOGAM
110	Mesin Gerinda Tangan	1	UPT LOGAM
111	Mesin Kompresor	3	UPT LOGAM
112	Mesin Las Listrik	4	UPT LOGAM
113	Mesin laser cutting	2	UPT LOGAM
114	Mesin Meiling	1	UPT LOGAM
115	Mesin Pembengkok Uni	2	UPT LOGAM
116	Mesin Pemotong Plat	1	UPT LOGAM
117	Mesin Perapen	1	UPT LOGAM
118	Mesin Press Hidrolik & Punch	4	UPT LOGAM
119	Mesin Skrup	1	UPT LOGAM
120	MEUBELAIR	3	DPKU
121	MEUBELAIR	4	UPT LOGAM
122	Mig weld	4	UPT LOGAM
123	Milling Machine (Mechanical Proces)	25	UPT LOGAM
124	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	UPT LOGAM
125	Mini lathe	2	UPT LOGAM
126	Mitre saw	4	UPT LOGAM
127	Note Book	11	DPKU
128	P.C Unit	20	DPKU

129	P.C Unit	69	UPT LOGAM
130	Palm sander	4	UPT LOGAM
131	Papan Nama Instansi	1	UPT LOGAM
132	Papan Tulis	2	UPT LOGAM
133	Papan Visual/Papan Nama	1	DPKU
134	Pararel Bar	2	UPT LOGAM
135	Paron	2	UPT LOGAM
136	Peralatan Komputer Lainnya	3	DPKU
137	Peralatan Las Listrik	5	UPT LOGAM
138	Peralatan Tukang Besi	1	UPT LOGAM
139	Perkakas Bangku Kerja	3	UPT LOGAM
140	Perkakas Bengkel Kayu lainnya	1	UPT LOGAM
141	Perkakas Bengkel Kerja	1	UPT LOGAM
142	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	3	UPT LOGAM
143	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (BERP)	8	UPT LOGAM
144	Perkakas Pemotong Plat	2	UPT LOGAM
145	Perkakas Pengecoran Logam	9	UPT LOGAM
146	Perkakas Standart (Standard Tools)	1	UPT LOGAM
147	Perlengkapan Bengkel Kayu	1	UPT LOGAM
148	Perlengkapan Bengkel Mekanik	4	UPT LOGAM
149	Pesawat Telephone	6	DPKU
150	Pick Up	1	UPT LOGAM
151	planer thicknesser	1	UPT LOGAM
152	Plasma cut	2	UPT LOGAM
153	Platting machine	4	UPT LOGAM
154	Polishing Machine/Mesin Poles	1	UPT LOGAM
155	Pompa Air	3	DPKU
156	Portable colorimeter	5	UPT LOGAM
157	Portable Compressor	4	UPT LOGAM
158	Portable Generating Set	1	UPT LOGAM
159	Powder press machine	1	UPT LOGAM
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	DPKU
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	UPT LOGAM
162	Rak Besi	5	DPKU

163	Rak Besi	18	UPT LOGAM
164	Rak Kayu	9	UPT LOGAM

165	Rak Kayu	5	DPKU
166	Rotary Filling	2	UPT LOGAM
167	Router	1	DPKU
168	Sand blasting machine	1	UPT LOGAM
169	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	UPT LOGAM
170	Sepeda Motor	2	UPT LOGAM
171	Sepeda Motor	15	DPKU
172	Set Moulding	1	UPT LOGAM
173	Sice	9	DPKU
174	Sice	1	UPT LOGAM
175	Site table saw	2	UPT LOGAM
176	Slide Projector (Lapangan)	1	DPKU
177	Sofa	1	DPKU
178	Sound System	2	DPKU
179	Spindle moulder	1	UPT LOGAM
180	Spray booth portable airbrush	2	UPT LOGAM
181	Spray booth portable Besar	3	UPT LOGAM
182	Spray gun finer core	10	UPT LOGAM
183	Stabilisator	1	UPT LOGAM
184	stacker electric	1	UPT LOGAM
185	Station Wagon	6	DPKU
186	Stationary Generating Set	1	DPKU
187	Switch Hub	1	DPKU
188	Tripod	3	UPT LOGAM
189	Tablet spray	10	UPT LOGAM
190	Tang Ampere	1	UPT LOGAM
191	Tangga Aluminium	3	DPKU
192	Tanggem	6	UPT LOGAM
193	Tanggem	1	UPT LOGAM
194	Televisi	4	DPKU
195	Tempat Tidur Kayu	30	UPT LOGAM
196	Tig weld	5	UPT LOGAM
197	Tilting Tester	1	UPT LOGAM

198	Tool Cabinet Set	7	UPT LOGAM
199	Tool Kit Box	1	UPT LOGAM
200	Tool Kit Set	3	UPT LOGAM
201	Truck + Attachment	1	UPT LOGAM
202	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Prose	1	UPT LOGAM
203	UV lighting for finishing	1	UPT LOGAM
204	Vacuum press for veener	1	UPT LOGAM
205	Venier Caliver	2	UPT LOGAM
206	Vernier Caliper	1	UPT LOGAM
207	Wheel Crane	1	UPT LOGAM
208	White Board	4	DPKU
209	White Board	2	UPT LOGAM
210	Wireless	2	DPKU
211	Wood copy lathe	2	UPT LOGAM
212	Wood planner	2	UPT LOGAM
213	Wood press machine 3 layer	1	UPT LOGAM

Sumber: Daftar Inventaris SIM Aset

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2017 – 2021 dan Renstra Tahun 2022 – 2026. Tetapi untuk capaian kinerja pelayanan akan ditampilkan data pencapaian lima tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2024. Meskipun Renstra berakhir tahun 2026 tetapi mulai tahun 2025 akan disusun Renstra baru periode 2025 – 2029 senyampang dengan ditetapkannya RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada periode sebelumnya, yakni periode 2020 – 2024. Sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Pencapaian target sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan trend positif. Dari seluruh indikator kinerja yang ditetapkan, realisasinya mencapai target meskipun realisasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor – faktor yang diluar kendali organisasi. Misalnya pada indikator Nilai Omzet Koperasi. Capaian kinerjanya pada tahun 2021 sebesar 96,38 %, tahun 2022 sebesar 82,82 %, tahun 2023 sebesar 107,80 % dan tahun 2024 sebesar 100,01 %. Tren tersebut dipengaruhi oleh faktor perubahan regulasi yang mengatur koperasi. Sebagian koperasi binaan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berpindah menjadi binaan Pemda DIY dan Pemerintah Pusat. Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel.2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai omset koperasi	-		-	-	-	-	403.950.000.000	406.366.988.994	368.330.174.952	397.157.422.559	-	389.328.164.538	336.557.181.503	397.157.422. 559	397.206.633.350	-	96,38%	82,82%	107,80%	100,01%
			Meningkatnya koperasi yang berkualitas				-	9 %	9,27 %	10,95 %	12,14 %	-	9 %	9,27 %	10,95 %	12,14 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Nilai Omset UKM Usaha Mikro	-		-	-	-	-	4.969.866.917	6.709.320.338	5.040.000.000	5.760.000.000	-	5.103.000.000	6.720.239.196	5.583.232.560	5.863.115.800	-	102,67%	100,16%	110,78%	101,79%
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				-	19,21 %	16,50 %	10,36 %	12,54 %	-	19,21 %	16,50 %	10,36 %	12,54 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Nilai Omset IKM	-		-	-	-	-	124.377.964	248.755.928	-	-	-	1.241.421.600	798.139.000	-	-	-	999,00%	320,85%	-	-
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota				-	27,52 %	35,04 %	5,79 %	1,91 %	-	27,52 %	35,04 %	5,79 %	1,91 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah Tenaga Kerja IKM	-		-	-	-	-	-	-	16.425	18.718	-	-	-	17.944	18.821	-	-	-	110,00%	100,55%
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				-	-	-	72,78 %	70,40 %	-	-	-	72,78 %	70,40 %	-	-	-	100 %	100 %
5	Nilai Investasi IKM	-		-	-	-	-	-	15.948.505.955	130.935.000.000	-	-	-	29.830.452.498	140.000.000.000	-	-	-	187,00%	106,92%	-
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Perluasan (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	A	100,00%	-	100%	100%	100%	100,00%

Sumber: LKIP 2024, Bahan LKPJ/LPPD 2024

Dalam pencapaian sasaran organisasi, dilakukan melalui implementasi beberapa program yang diukur melalui indikator kinerja masing – masing program.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Program Tahun 2020 – 2024

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi Yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	unit	-	-	115	115	115	117	115	115	115	115
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi Simpan pinjam Yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat Penilaian kesehatan Kategori sehat tahun n	unit	-	-	115	115	115	117	115	115	115	115

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	orang	-	-	465	465	465	490	540	540	690	690
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	unit	-	-	10	10	15	15	21	21	27	27
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	UKM	-	-	100	100	100	110	100	100	100	115
	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	UKM	-	-	400	400	400	410	400	425	400	400
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	UKM	-	-	30	30	30	30	35	35	40	40

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri Yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	-	-	5	6,2	6	6,29	6,30	12,05	6,9	10,17
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri/total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	-	-	2	3,41	-	-	1,60	3,86	1,8	61,87
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter- update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pendapatan UPT logam	Pendapatan UPT logam tahun n	Rp	-	-			437.900.000	462.535.073	440.000.000	467.746.358	490.500.000	566.776.486
	Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	Nilai	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A

Sumber: LKIP Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja diatas diraih dengan menjalankan sejumlah upaya, antara lain:

1. Pembuatan Profil Sentra IKM dan Layanan *Digital Marketing*

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan basis data yang terinci mengenai sentra dan pengrajin, sekaligus membantu pemasaran produk layanan pengrajin. Sasaran utama kegiatan adalah komunitas sentra IKM serta pelaku usaha IKM Yogyakarta yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknologi pemasaran, tetapi juga menghadirkan layanan secara nyata sesuai kondisi dan kebutuhan IKM di lapangan.

   Kolaborasi dalam kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain tenaga ahli desainer, tenaga ahli coaching, pelaksana program MSIB, serta mahasiswa magang. Peran masing-masing pihak berjalan secara sinergis: tenaga ahli desainer memberikan panduan dalam perancangan profil dan strategi branding sentra, tenaga ahli coaching memastikan proses pendampingan berjalan sesuai kebutuhan IKM, pelaksana program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) menghadirkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, sementara mahasiswa magang ikut mendukung proses kreatif dan teknis dalam digital marketing maupun penyusunan profil. PDIN sendiri berperan sebagai fasilitator utama yang menghubungkan seluruh elemen dalam kegiatan ini serta memastikan tersedianya ruang kolaborasi yang kondusif.

   Tahapan pelaksanaan dilakukan secara sistematis, dimulai dari koordinasi internal, dilanjutkan dengan koordinasi eksternal bersama stakeholder, penentuan jadwal, persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Melalui strategi ini, kegiatan berjalan terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan target. Hasil yang diharapkan tidak hanya berupa basis data profil sentra dan pengrajin, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku IKM dalam memahami pemasaran digital dan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pasar. Dengan demikian, kerja sama yang terjalin pada tahun 2024 ini

menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi, menjadikan PDIN sebagai ruang kolaborasi yang efektif bagi IKM Kota Yogyakarta untuk lebih adaptif dan kompetitif di tengah tantangan industri.

2. Pendampingan Kolaboratif Pengembangan Produk IKM

Sebagai bagian dari upaya memperkuat inovasi dan daya saing pelaku usaha di Kota Yogyakarta, kegiatan ini berangkat dari kebutuhan IKM untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman produksi semata, tetapi juga memperoleh perspektif baru melalui kolaborasi lintas disiplin. Melalui pendekatan kolaboratif, PDIN menghadirkan tim tenaga ahli yang terdiri dari berbagai bidang, seperti manufaktur, seni dan estetika, pemahaman pasar, hingga hak kekayaan intelektual (HKI), untuk mendampingi IKM dalam merancang produk yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen dan berdaya saing tinggi.

Maksud kegiatan ini adalah menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan IKM memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam proses pengembangan produk, mulai dari ideasi hingga lahirnya rancangan yang siap dikembangkan menjadi prototype. Tujuannya adalah agar pelaku IKM memiliki produk yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memenuhi aspek desain, estetika, perlindungan HKI, dan sesuai dengan tren pasar.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan strategi yang terstruktur, dimulai dari pembentukan panel tenaga ahli, pembangkitan ide bersama pelaku IKM, diskusi lintas disiplin, hingga pendampingan langsung dalam proses perancangan. PDIN berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang dan sarana kolaborasi, sekaligus menghubungkan antara tenaga ahli dengan pelaku usaha. Stakeholder yang terlibat meliputi asosiasi chef yang memberikan masukan terkait fungsi produk, desainer produk yang menajamkan aspek estetika dan ergonomi, tenaga ahli HKI yang memberikan pemahaman tentang perlindungan hasil inovasi, serta tenaga ahli pasar yang membantu mengarahkan produk sesuai kebutuhan konsumen.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai kalangan, antara lain pelaku usaha IKM di sentra, mahasiswa, pelajar, komunitas asosiasi desain, masyarakat umum, serta pemerhati desain produk. Peran peserta bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai kontributor ide dalam proses perancangan, sehingga interaksi yang terjadi bersifat dua arah dan mendorong lahirnya gagasan inovatif. Mahasiswa dan pelajar yang terlibat memperoleh pengalaman praktik nyata dalam dunia industri kreatif, sementara pelaku IKM mendapatkan pendampingan intensif yang berorientasi pada hasil.

Dari kegiatan ini, tercapai sejumlah hasil penting, antara lain lahirnya rancangan produk baru yang inovatif, meningkatnya pemahaman pelaku IKM terhadap pentingnya aspek HKI dalam inovasi, serta terbentuknya sinergi antara akademisi, desainer, tenaga ahli, dan pelaku usaha. Dengan model pendampingan kolaboratif ini, UPT Logam/PDIN berhasil memfasilitasi proses inovasi yang lebih menyeluruh, menjadikan IKM tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga memiliki keunggulan dalam desain, perlindungan hukum, dan penerimaan pasar.

3. Pengembangan Desain Melalui Etnografi

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan desain melalui pendekatan etnografi sebagai salah satu strategi inovasi berbasis riset lapangan. Kegiatan ini berangkat dari kesadaran bahwa desain produk IKM tidak bisa hanya berorientasi pada tren pasar semata, melainkan juga harus berakar pada budaya, kebiasaan, serta kearifan lokal masyarakat. Melalui etnografi, PDIN berupaya menggali nilai-nilai, narasi, dan perilaku masyarakat yang dapat dijadikan inspirasi dalam menciptakan desain produk yang autentik, relevan, dan memiliki keunikan yang membedakan dari produk massal.

Maksud kegiatan ini adalah menjadikan metode etnografi sebagai instrumen pembelajaran dan pengembangan produk IKM agar pelaku usaha mampu memahami secara mendalam bagaimana masyarakat menggunakan, memaknai, dan menghargai suatu produk. Tujuannya adalah menghasilkan desain yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu menyampaikan cerita, identitas budaya, serta nilai sosial yang

melekat pada produk tersebut, sehingga memiliki daya tarik lebih tinggi baik di pasar lokal maupun global.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui serangkaian tahapan. Pertama, PDIN bersama tim ahli melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi perilaku pengguna dan konteks budaya di berbagai komunitas. Kedua, dilakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan masyarakat, pelaku IKM, maupun komunitas pengguna untuk menggali narasi dan pengalaman langsung. Ketiga, data etnografi yang terkumpul dianalisis dan diterjemahkan menjadi inspirasi desain, yang kemudian dikembangkan menjadi konsep produk. PDIN memfasilitasi proses ini dengan menyediakan ruang diskusi, laboratorium desain, serta dukungan tenaga ahli yang mendampingi IKM dalam menerjemahkan hasil riset ke dalam desain nyata.

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi tenaga ahli desain produk, peneliti sosial budaya, tenaga ahli coaching, serta mahasiswa magang yang membantu dalam proses pengumpulan data dan analisis. Selain itu, komunitas masyarakat lokal juga berperan penting sebagai sumber pengetahuan utama, sementara pelaku IKM menjadi pihak yang mengadopsi hasil etnografi ke dalam rancangan produk. Peran masing-masing berjalan saling melengkapi: peneliti memberikan metodologi, tenaga ahli desain mengarahkan visualisasi produk, mahasiswa magang mendukung teknis dokumentasi dan pengolahan data, sedangkan pelaku IKM mengintegrasikan temuan etnografi ke dalam proses produksi mereka.

Peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha IKM, komunitas budaya, mahasiswa, serta desainer muda yang secara aktif terlibat dalam eksplorasi data etnografi dan pengembangan konsep desain. Interaksi yang terjadi membuka ruang pertukaran ide lintas generasi, di mana pengalaman lokal masyarakat berpadu dengan kreativitas akademisi dan praktisi desain.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah lahirnya sejumlah konsep desain produk yang terinspirasi dari budaya lokal, seperti bentuk, motif, maupun narasi visual yang berakar pada tradisi Yogyakarta. Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai komersial,

tetapi juga nilai budaya yang mampu memperkuat identitas lokal dalam persaingan global. Selain itu, pelaku IKM memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya riset etnografi dalam desain, sehingga mereka tidak lagi sekadar membuat produk berdasarkan intuisi, melainkan berdasarkan pemahaman yang lebih dalam terhadap pengguna dan lingkungan sosialnya.

Dengan keberhasilan kegiatan ini, PDIN mempertegas posisinya sebagai pusat inovasi yang menghubungkan tradisi dan modernitas melalui pendekatan desain. Pendekatan etnografi yang diintegrasikan ke dalam pengembangan produk IKM terbukti mampu memberikan keunikan sekaligus daya saing yang berkelanjutan, sehingga menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

4. Inovasi Berbasis HKI

Pada tahun 2024, UPT Logam/PDIN Kota Yogyakarta menempatkan inovasi berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu program unggulan. Latar belakang kegiatan ini sederhana namun penting, yakni banyak IKM di Yogyakarta menghasilkan karya kreatif dan produk inovatif, tetapi sering kali tidak memahami bagaimana melindungi hasil karyanya agar tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain. Akibatnya, potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam produk tidak maksimal karena belum ditopang oleh perlindungan hukum yang memadai.

Melalui program ini, PDIN ingin mendorong pelaku IKM untuk menyadari bahwa inovasi harus berjalan seiring dengan perlindungan. Kegiatan tidak hanya berfokus pada sosialisasi pentingnya HKI, tetapi juga diarahkan pada praktik nyata: bagaimana sebuah ide, desain, maupun produk bisa didaftarkan dan mendapatkan pengakuan hukum. Dengan perlindungan tersebut, pelaku IKM memperoleh kepastian dalam berinovasi sekaligus meningkatkan daya tawar produk mereka di pasar.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi produk inovatif hasil pendampingan yang layak diajukan untuk perlindungan HKI. Tahap berikutnya berupa

workshop dan diskusi bersama tenaga ahli HKI untuk memberi pemahaman teknis tentang mekanisme perlindungan merek, desain industri, paten sederhana, maupun hak cipta. Setelah itu, pelaku IKM didampingi dalam penyusunan dokumen pendaftaran hingga pengajuan ke lembaga resmi terkait.

Stakeholder yang dilibatkan dalam program ini antara lain tenaga ahli hukum dan konsultan HKI, perguruan tinggi yang memiliki pusat studi HKI, mahasiswa magang yang membantu proses administratif, serta komunitas kreatif yang ikut mendukung penyebaran informasi mengenai pentingnya HKI. Peran PDIN sendiri sangat sentral, yakni sebagai fasilitator dan jembatan antara pelaku IKM dengan lembaga atau tenaga ahli yang berkompeten.

Peserta kegiatan terdiri dari operator UPT Logam/PDIN dan komunitas desainer mitra PDIN. Operator mendapat manfaat dengan meningkatnya pemahaman tentang bagaimana produk yang mereka hasilkan bisa memiliki nilai tambah melalui perlindungan hukum, sedangkan para desainer memperoleh wawasan baru mengenai cara memanfaatkan dokumen HKI sebagai sumber ide inovasi sekaligus perlindungan karya mereka. Interaksi antara kedua kelompok ini menghasilkan kolaborasi yang lebih kokoh, di mana operator mampu menghasilkan produk sesuai standar kualitas, sementara desainer memastikan karya tersebut memiliki kekuatan legal dan daya saing lebih tinggi.

Dari kegiatan ini, sejumlah produk berhasil masuk ke tahap pendaftaran merek dan desain industri. Bahkan ada beberapa karya desain yang sebelumnya hanya dianggap sebagai eksperimen, kini mendapatkan perlindungan hukum dan diproyeksikan untuk menjadi produk unggulan. Selain hasil konkret berupa dokumen HKI, manfaat lain yang terasa adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya orisinalitas dan keberanian berinovasi.

Program inovasi berbasis HKI ini menegaskan peran PDIN sebagai penggerak ekosistem industri kreatif yang tidak hanya mendorong lahirnya produk baru, tetapi juga memastikan keberlanjutannya melalui perlindungan hukum. Dengan langkah ini, IKM di Kota

Yogyakarta tidak lagi hanya kuat di sisi produksi dan pemasaran, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi persaingan global.

5. Pendampingan kolaboratif Pengembangan Produk IKM

sebagai salah satu langkah nyata untuk mempercepat literasi inovasi dan memfasilitasi tumbuhnya ekosistem kreatif yang solid di lingkungan industri kecil dan menengah (IKM). Kegiatan ini berangkat dari kesadaran bahwa sentra PDIN tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan desain, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi lintas disiplin yang mampu mempertemukan berbagai aktor— mulai dari pelaku IKM, desainer profesional, hingga talenta kreatif muda—dalam satu ruang yang produktif. Dengan kondisi Yogyakarta yang memiliki potensi besar dalam talenta kreatif, kegiatan ini diarahkan untuk menjembatani potensi tersebut agar lebih dekat dengan kebutuhan nyata pelaku usaha IKM, sehingga lahir desain produk inovatif yang relevan dengan pasar, memiliki nilai estetika tinggi, serta dapat membantu peningkatan penjualan.

Kegiatan pendampingan ini berlangsung melalui kerjasama strategis antara UPT Logam/PDIN, pelaku profesional di bidang desain, serta komunitas talenta kreatif. UPT Logam/PDIN berperan sebagai koordinator yang memastikan tersedianya fasilitas, ruang kolaborasi, dan instrumen penunjang kegiatan. Tenaga ahli dari berbagai disiplin—mulai dari manufaktur, seni/estetika, hingga pemasaran—dilibatkan untuk memberikan bimbingan komprehensif. Para desainer profesional berperan mendampingi peserta dalam proses perancangan ide, penyusunan konsep, hingga finalisasi desain produk, sementara komunitas pelaku usaha IKM di Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama yang mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan kualitas produk dan kemampuan inovasi.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sangat beragam, mencakup pelaku usaha IKM, masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap desain produk, komunitas pemerhati desain, serta pelajar dan mahasiswa yang ingin memperdalam wawasan di bidang pengembangan produk. Keberagaman peserta tersebut mencerminkan

semangat inklusivitas PDIN dalam membuka ruang belajar dan kolaborasi lintas generasi, sehingga transfer ilmu dan keterampilan dapat terjadi secara alami dan berkelanjutan.

Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis, dimulai dengan pembentukan tim tenaga ahli dari berbagai bidang yang bertugas menyusun kurikulum pendampingan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kegiatan melalui seminar dan forum publik, dengan tujuan membangkitkan minat talenta kreatif untuk ikut terlibat. Proses berikutnya adalah seleksi calon asisten tenaga ahli dengan latar belakang desain teknis (CAD), pengalaman produk, atau pemahaman estetika, sekaligus seleksi IKM yang akan didampingi. Setelah tim terbentuk, peserta IKM bersama para asisten tenaga ahli diarahkan untuk melakukan proses pembangkitan ide dan gagasan konsep produk, yang kemudian diseleksi dan difinetuning bersama tenaga ahli multidisiplin. Hasil pendampingan diwujudkan dalam pemaparan konsep pengembangan produk dan diakhiri dengan pembuatan prototype yang siap dimanufaktur oleh pelaku IKM.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi lintas aktor dan disiplin dapat melahirkan nilai tambah yang signifikan bagi pengembangan IKM. UPT Logam/PDIN berhasil memfasilitasi proses transformasi ide menjadi produk nyata melalui dukungan profesional, keterlibatan komunitas desain, serta partisipasi aktif pelaku IKM. Melalui pendampingan kolaboratif ini, tidak hanya tercipta desain produk inovatif, tetapi juga tumbuh ekosistem pembelajaran yang mempertemukan pengalaman praktis pelaku usaha dengan kreativitas generasi muda. Dampaknya, IKM di Kota Yogyakarta semakin siap menghadapi persaingan dengan produk-produk yang lebih inovatif, berkualitas, dan memiliki daya jual yang lebih tinggi di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

6. Pelatihan Mesin Batik Butimo

Pelatihan Mesin Batik Butimo sebagai salah satu agenda strategis untuk mendorong percepatan inovasi di bidang kriya, khususnya batik, yang menjadi identitas budaya sekaligus potensi ekonomi penting di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilandasi kebutuhan bahwa

pelaku usaha batik perlu dikenalkan dengan konsep Batik 4.0, yaitu integrasi proses tradisional dengan teknologi mesin yang lebih efisien, presisi, dan mampu menghasilkan kualitas produk yang konsisten. Melalui pelatihan ini, PDIN berupaya membangun kesadaran bahwa teknologi bukanlah pengganti kearifan tradisi, melainkan penguat dalam memperluas kreativitas, meningkatkan produktivitas, serta memastikan keberlanjutan usaha batik di tengah persaingan global.

Pelatihan ini terselenggara berkat kolaborasi erat antara UPT Logam/PDIN dengan instruktur ahli teknologi mesin batik serta desainer batik profesional. UPT Logam berperan sebagai fasilitator utama yang menyiapkan sarana, prasarana, serta proses koordinasi, sementara instruktur berkontribusi memberikan materi teknis mengenai cara pengoperasian mesin Batik Butimo, termasuk standar kualitas dan perawatan mesin. Di sisi lain, desainer batik dilibatkan untuk menjembatani pemahaman antara penggunaan mesin dengan proses kreatif perancangan motif, sehingga peserta mampu menggabungkan kemampuan teknis dan estetika dalam menghasilkan karya batik yang inovatif namun tetap berakar pada nilai budaya lokal.

Peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha IKM batik di Kota Yogyakarta, yang sehari-hari berhadapan dengan tantangan efisiensi produksi dan kualitas, serta operator dan komunitas desainer di PDIN yang memiliki peran penting sebagai katalis inovasi di sentra. Para pelaku IKM memperoleh pengalaman langsung bagaimana memanfaatkan mesin Butimo untuk mempercepat proses batik tulis tanpa mengurangi nilai artistik, sedangkan operator PDIN dilatih agar mampu menjadi tenaga pendukung teknis dalam pemeliharaan mesin, memastikan keberlanjutan teknologi di lingkungan sentra. Adapun komunitas desainer berperan aktif mengadaptasi motif-motif batik agar dapat diaplikasikan melalui mesin, sekaligus merancang pola yang relevan dengan tren pasar.

Metode pelatihan disusun dengan pendekatan komprehensif dan aplikatif. Tahap awal berupa tatap muka di kelas, di mana peserta diberikan pemahaman dasar tentang konsep Batik 4.0, standar

kualitas, dan urgensi teknologi dalam industri kreatif. Setelah itu dilanjutkan dengan praktik langsung penggunaan mesin Batik Butimo, mulai dari perancangan pola, eksekusi, hingga evaluasi hasil. Peserta juga dibekali keterampilan dasar perawatan mesin, agar teknologi yang dihadirkan tidak berhenti hanya pada saat pelatihan, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan koordinasi internal di lingkungan PDIN, dilanjutkan dengan komunikasi bersama stakeholder eksternal untuk menentukan jadwal dan substansi kegiatan, perekrutan peserta, serta persiapan teknis. Proses pelaksanaan berlangsung interaktif, dengan peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga aktif mencoba, berdiskusi, dan mengeksplorasi motif masing-masing. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan peserta meningkat, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan lanjutan.

Secara keseluruhan, pelatihan ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas pihak mampu menghadirkan manfaat yang luas. UPT Logam/PDIN berhasil menjembatani dunia tradisi batik dengan kemajuan teknologi melalui sinergi antara instruktur teknis, desainer, operator, dan pelaku IKM. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya ditandai dengan peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga tumbuhnya kesadaran bersama bahwa transformasi teknologi dalam batik bukan ancaman, melainkan peluang besar untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing batik Yogyakarta di level nasional maupun global..

7. Pelatihan Kriya

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan pembinaan dan inovasi yang tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Komunitas pelaku usaha dan desainer di sentra membutuhkan pengenalan lebih dekat dengan loncatan teknologi, terutama bagaimana teknologi dapat mendukung proses penciptaan kriya yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menguasai kriya berbasis inovasi serta menemukan sumber ide kreatif menjadi keharusan bagi pengelolaan PDIN agar mampu menjawab tantangan industri kreatif yang terus berkembang.

Pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman dasar tentang kriya, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas. Materi pelatihan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari pengenalan teori kriya, praktik perancangan desain, penggunaan mesin dan alat produksi, hingga pengenalan metode penjaminan kualitas. Dengan pendekatan komprehensif ini, para peserta tidak hanya dilatih dari sisi teknis, tetapi juga diajak memahami bagaimana sebuah produk kriya bisa memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika didukung dengan inovasi desain dan pemahaman kualitas.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak melalui pola kolaborasi. Instruktur profesional dihadirkan untuk memberikan materi dan praktik teknis, desainer mitra PDIN turut serta berbagi pengalaman mengenai sumber ide serta tren kriya yang sedang berkembang, sedangkan asosiasi profesional menjadi mitra strategis dalam memberikan wawasan tentang standar industri serta peluang jejaring yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta. UPT Logam/PDIN berperan sebagai penyelenggara utama yang mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan stakeholder, penentuan jadwal, perekrutan peserta, hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari operator UPT Logam Kota

Yogyakarta dan desainer mitra PDIN, yang menjadi target utama penerima manfaat. Para operator mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mereka dalam pengoperasian peralatan produksi kriya, sedangkan para desainer mendapatkan ruang kolaboratif untuk menguji ide-ide kreatifnya langsung dengan dukungan teknologi yang ada di PDIN. Melalui interaksi antara operator dan desainer, tercipta kolaborasi sinergis yang mempertemukan keterampilan teknis dengan kreativitas desain.

Pelatihan ini dilaksanakan melalui kombinasi metode tatap muka di kelas dan praktik langsung. Sesi kelas digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar kriya, standar kualitas, serta pentingnya inovasi dalam menciptakan produk. Selanjutnya, peserta diarahkan pada praktik perancangan, penggunaan alat, dan simulasi penjaminan kualitas. Proses ini memberikan pengalaman nyata sehingga peserta lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan nyata pada kompetensi peserta. Operator menjadi lebih percaya diri dalam mengoperasikan peralatan dan menghasilkan produk kriya yang sesuai standar, sementara desainer memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai keterbatasan dan peluang teknis dalam produksi kriya. Dengan demikian, pelatihan ini berhasil menciptakan jembatan kolaborasi antara desainer dan operator, yang pada akhirnya akan berdampak pada penguatan ekosistem inovasi di PDIN.

8. Pelatihan Perancangan dan Perawatan Moulding bersama IMDIA

Melaksanakan kegiatan strategis berupa Pelatihan IMDIA (Indonesia Mould and Dies Industry Association) yang ditujukan khusus untuk memperkuat kompetensi operator UPT Logam sekaligus mendukung peningkatan kapasitas Sentra IKM Aluminium Umbulharjo. Kegiatan ini berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, di mana para pelaku usaha dan komunitas IKM aluminium menghadapi tantangan besar untuk menguasai teknologi terkini, terutama dalam proses casting dan desain moulding. Kedua hal

tersebut merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas hasil produksi industri logam. Tanpa penguasaan teknologi perancangan dan perawatan moulding yang baik, kualitas produk sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pelatihan ini dihadirkan sebagai upaya terarah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta standar kualitas kerja para operator.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerja sama erat dengan IMDIA (Indonesia Mould and Dies Industry Association), sebuah asosiasi nasional yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang mould and dies. PDIN berperan sebagai fasilitator utama, mulai dari koordinasi internal, penentuan kebutuhan pelatihan, hingga perekrutan peserta. IMDIA hadir sebagai mitra profesional yang menyediakan tenaga ahli dan instruktur untuk membekali para peserta dengan materi mendalam terkait perancangan, perawatan, dan standar kualitas moulding. Selain itu, komunitas IKM di Sentra Aluminium Umbulharjo juga turut dilibatkan, baik sebagai pihak yang memberikan masukan mengenai kebutuhan nyata di lapangan maupun sebagai penerima manfaat tidak langsung dari peningkatan keterampilan para operator UPT Logam.

Peserta kegiatan ini terdiri dari operator UPT Logam Kota Yogyakarta, yang dipilih secara selektif agar sesuai dengan kriteria teknis dan target pembelajaran. Selama proses pelatihan, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis melalui praktik langsung yang dipandu oleh instruktur dari IMDIA. Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar desain moulding, teknik perawatan komponen, hingga standar kualitas yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan produksi. Dengan pendekatan ini, diharapkan para operator mampu mengaplikasikan keterampilan baru secara langsung dalam pengelolaan mesin produksi di UPT Logam maupun dalam mendampingi komunitas IKM aluminium.

Tahapan kegiatan dimulai dari koordinasi internal dan eksternal, penjadwalan bersama mitra IMDIA, perekrutan peserta, hingga persiapan teknis pelatihan. Setelah proses pembelajaran berlangsung,

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hasilnya, para operator menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman maupun keterampilan teknis, terutama dalam menjaga standar kualitas perancangan dan perawatan moulding. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi operasional UPT Logam, tetapi juga memperkuat kapasitas pembinaan terhadap komunitas IKM aluminium di Kota Yogyakarta.

Melalui kolaborasi ini, UPT Logam/PDIN membuktikan komitmennya untuk terus membuka ruang pengembangan kompetensi berbasis teknologi, menghadirkan sinergi nyata antara lembaga daerah dengan asosiasi nasional. Dengan dukungan profesional dari IMDIA, kegiatan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat daya saing IKM aluminium lokal agar lebih siap menghadapi dinamika industri manufaktur modern.

9. Pemeringkatan Koperasi

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2021 hingga 2024. Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi.

Koperasi yang pernah mengikuti pemeringkatan koperasi antara lain:

3. Koperasi Wanita Ratna Sari
4. Koperasi Serba Usaha Tanjung Wangi
5. Koperasi Serba Usaha Tresna
6. Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK Pengadilan Negeri
7. Koperasi Karyawan GSEM Guyub Srananing Enggal Maju
8. Koperasi Serba Usaha Armina
9. Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri KOPERKITA
10. Koperasi Pegawai Negeri Mesra
11. Koperasi Serba Usaha Agribisnis Sukses Madani
26. Koperasi Karyawan Agung Mentari
27. Koperasi Persatuan Wredhatama
28. Koperasi Pegawai Negeri Rizki Barokah MAN II
29. Koperasi Pegawai Negeri Setaman
30. Koperasi Wanita Sapta Rini
31. PERIPABRI JAYA LESTARI
32. Koperasi Konsumen Pegawai Kereta Api KOPEKA
33. Koperasi Karyawan Harian Jogja Harjo
34. Koperasi Karyawan Melia Purosani

12. Koperasi Pegawai Negeri Dinas P dan K	35. Koperasi Pegawai Negeri Setwan
13. Koperasi Konsumen Among Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	36. PRIMKOPAD KARTIKA B-14
14. Koperasi Primer Oditurat Militer II-10 Yogyakarta	37. Koperasi Karyawan Amanah
15. Primkopabri III Boga Yudha	38. Koperasi Wanita Pertiwi
16. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ubet	39. Koperasi Karyawan Barokah
17. Koperasi Serba Usaha Keras	40. Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Barokah
18. Koperasi Konsumen Primkop Kartika B Sebelas	41. Koperasi Pegawai Negeri Manunggal Taman Budaya
19. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun GURU SMP 8	42. Koperasi Pegawai Negeri Melati Putih SMPN 13
20. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Niaga Karya	43. Koperasi Pegawai Negeri Misoyomino
21. Koperasi Serba Usaha Eka Kapti	44. Koperasi Pasar Padang Pangan
22. Koperasi Konsumen Pegawai Bank Negara Indonesia Swadharma Yogyakarta	45. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Adhyaksa
23. Koperasi Serba Usaha Sopotresno	46. Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Batik PPBI
24. Koperasi Karyawan Bhakti Martani	47. Koperasi Batik Senopati
25. Koperasi Serba Usaha Sapto Tunggal	48. Koperasi Batik Mataram
26. Koperasi Wredatama Rukun Sejahtera	49. Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMP 1
25. Pusat Koperasi Wanita Dewi Kunthi	50. Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kaki Lima Tri Dharma

10. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk koperasi.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi dan menciptakan jaringan pemasaran. Terdapat beberapa aktivitas, antara lain:

a. Pameran Hari Koperasi. Kegiatan Gebyar KUKM Nusantara 2024 dan Batam Tradeinvest Expo 2024 dilaksanakan di Nagoya Hill Shopping Mall – Batam tanggal 1 – 4 Agustus 2024. Diikuti oleh Koperasi BTM Kotagede dan Koperasi AMKKY,
b. Gelar Produk Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 Gelar Potensi Koperasi tahun 2021 dilaksanakan di Jogja City Mall dan Jogja Expo Centre. Tahun 2024,

kegiatan Pameran Jogja Expo (Pameran Produk Unggulan dan Peluang Investasi) 2024 dilaksanakan di Plaza Malioboro, Yogyakarta.

c. Smaradahana#3. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga 2024. Koperasi yang pernah mengikuti kegiatan ini antara lain :

1) Koperasi Sopo Tresno
2) Koperista
3) Sumekar
4) Kopwan Melati
5) Agribisnis Sukses Madani
6) Wirarini
7) Mandiri Taspen
8) BTM Kotagede
9) Bhakti Ibu AMKKY
10) Dewi Sri
11) Kopkamu
12) Koperasi Jasa Listrik Damar Kencana
13) Koperasi Bank sampah Induk

11. Bimbingan Teknis bagi SDM Koperasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas pengurus dan pengelola koperasi. Kegiatan yang pernah dilaksanakan antara lain :

a. Diklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi. Diklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi yang pernah dilaksanakan adalah Analis Pinjaman.
b. Bimtek Perkoperasian. Bimtek yang pernah dilaksanakan antara lain Bimtek Perizinan Berbasis Risiko, Bimtek Pengesahan Koperasi via AHU Online
c. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
d. Pendampingan pasca diklat

12. Diversifikasi Produk

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian Koperasi UKM melalui Bidang Industri menyelenggarakan kegiatan *Pendampingan Diversifikasi Produk* bagi pelaku IKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi produk, memperluas pasar, serta menyesuaikan produk dengan tren dan kebutuhan konsumen masa kini. Kegiatan ini melibatkan 10 IKM di sektor fashion dan kerajinan sebagai peserta pendampingan serta menggandeng Forum Meubel Kerajinan & Seni (FORMEKERS) Indonesia sebagai tim Ahli pendampingan. IKM yang terlibat pada kegiatan ini adalah:

a. Kalu Art
b. Sae Sae Eco Fashion
c. CV. Prestige Furniture
2. Kerang Wijaya
3. Revele Leather
f. ABC Wooden Toys
g. Batik Bocah
h. Wiroto Craft
i. Yuka Stone Art
j. PT. Harmoni Jaya Kreasi

Hasil *prototype* dari kegiatan diversifikasi produk ini menunjukkan peningkatan dari sisi desain, fungsi, dan keunikan, serta dipamerkan pada pameran SEKATI 2024 yang bertempat di Plaza Malioboro bulan Desember 2024.

13. *Business Matching*

Business Matching adalah aktivitas untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan calon mitra bisnis yang potensial. Pelaku usaha yang pernah mengikuti kegiatan ini, antara lain :

a. PT Multi Modern Nusantara
b. PT Sadamaya Graha Teknologi
c. PT Sarana Kencana Mulya, PT Vilabs Teknologi Indonesia
d. PT Intisumber Hasil Sempurna Global
e. PT Aerotek Global Inovasi
f. CV Computa
g. Kalu Art
h. Starfindo

i. Pusat Desain Industri Nasional
j. Sentra Industri Perak dan Aluminium
k. Sentra Industri Tahu
l. Sentra Industri Batik
m. Sentra Industri Jumputan.

Pada kegiatan tersebut, masing-masing perusahaan mendapat ruang untuk mempresentasikan profil dan produk secara langsung di hadapan tamu undangan. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, berbagai instansi vertikal kementerian di wilayah Yogyakarta, Puskesmas se-kota Yogyakarta, rumah sakit pemerintah dan swasta, BUMD, serta perguruan tinggi.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan produk dalam negeri yang ditawarkan oleh para penyedia semakin dikenal, khususnya di kalangan instansi pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong para produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk serta memperluas jejaring relasi, sehingga mendukung penguatan peran Produk Dalam Negeri (PDN) dalam berbagai sektor pelayanan publik dan kebutuhan kelembagaan.

14. Penumbuhan Wirausaha Baru

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru. Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan, antara lain :

a. Home Business Camp (HBC), ditujukan bagi pelaku usaha muda usia 18 – 28 tahun
b. Karang Mitra Usaha (KaMU), ditujukan bagi pelaku usaha usia diatas 28 tahun
c. SAKA (Satuan Karya) Wirausaha, merupakan rintisan dari Gerakan Pramuka yang bertujuan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan bagi anggota Pramuka.

15. Peningkatan kapasitas pelaku UKM

Merupakan upaya untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UKM di Kota Yogyakarta. Kegiatan yang

pernah dilakukan antara lain :

a. Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UKM
b. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UKM
c. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Gandeng Gendong
d. Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru

16. Fasilitasi publikasi, promosi dan pemasaran bagi koperasi dan pelaku UKM/IKM

Promosi dan pemasaran merupakan aktivitas penting bagi koperasi dan pelaku UKM/IKM. Melalui aktivitas ini mereka memperkenalkan produk/jasa yang dihasilkan dan memasarkannya. Kegiatan yang pernah dilakukan antara lain :

a. Blocking Time Wirausaha Muda Baru Home Business Camp (HBC)
b. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang koperasi dan UKM/IKM
c. Fasilitasi gerai pemasaran bagi anggota HBC dan KaMU

17. Fasilitasi kemitraan UKM

Fasilitasi kemitraan adalah fasilitasi kerjasama antara UKM dengan pihak lain seperti usaha besar, usaha menengah atau UKM lain yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling percaya dan saling menguntungkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing UKM di Kota Yogyakarta.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Layanan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ditujukan untuk kelompok penerima sasaran antara lain UKM/IKM dan koperasi di Kota Yogyakarta. Layanan yang diberikan berupa:

1. Pelayanan administrasi seperti rekomendasi pembentukan koperasi, rekomendasi pengurangan biaya pengajuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual);

2. Pembinaan dan pengembangan berupa pelatihan, pendampingan dan konsultasi bagi pelaku UKM/IKM dan koperasi, pendampingan inovasi dan pengembangan produk;

3. Layanan perizinan dan sertifikasi berupa fasilitasi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat Halal, HAKI maupun perizinan serta sertifikasi lainnya;
4. Promosi dan Pemasaran berupa fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan serta promosi/pemasaran produk-produk UKM/IKM dan koperasi.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan sendiri mengingat keterbatasan wewenang maupun sumber daya. Oleh karenanya Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta bermitra dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan layanan. Mitra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sesuai dengan *crosscutting* pohon kinerja antara lain:

1. Kementrian yang membawahi urusan perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bentuk dukungan berupa pembuatan kebijakan terkait urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membawahi urusan perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bentuk dukungan berupa supervisi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi sebagian anggaran untuk pelaksanaan program kerja.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bentuk dukungan berupa konfirmasi Nomor Induk Kependudukan Kota Yogakarta.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Yogyakarta. Bentuk dukungan berupa data dasar IKM/UKM yang memiliki NIB sebagai dasar pemantauan izin usaha industri.

5. Dinas Kesehatan. Bentuk dukungan berupa fasilitasi P-IRT bagi UKM/IKM binaan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kota Yogyakarta.

6. LPPM UII. Bentuk dukungan berupa memberikan edukasi mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) berikut pendampingannya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bentuk dukungan berupa menetapkan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal bagi UKM/IKM binaan.
8. Lembaga Sertifikasi Profesional. Bentuk dukungan berupa melakukan uji kompetensi yang sistematis dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi pengurus koperasi dan pelaku UKM/IKM.
9. Media massa dan media elektronik. Bentuk dukungan berupa publikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
10. Ikatan Notaris Indonesia. Bentuk dukungan berupa asistensi dan kemudahan legalitas kelembagaan koperasi.
11. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. Bentuk dukungan berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi.
12. Dunia usaha/swasta. Bentuk dukungan berupa menjalin jejaring pemasaran produk UKM/IKM dan koperasi.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah berupa penyampaian informasi pembiayaan bagi UKM/IKM. Informasi tersebut disampaikan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

2.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tangung jawab Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta diantaranya adalah kerjasama dijalin oleh UPT Logam dan PDIN (Pusat Desain Industri Nasional) dengan berbagai pihak yang bertujuan ekosistem

inovasi, meningkatkan kapasitas pelaku IKM, serta memperluas jangkauan pemasaran produk IKM. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas disiplin, baik dari kalangan tenaga ahli, asosiasi profesi, perguruan tinggi, instruktur, desainer, mahasiswa magang, hingga pelaku usaha IKM.

- Perjanjian kerjasama HKI (Hak Kekayaan Intelektual) antara para desainer industri dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh UPT Logam. Melalui perjanjian ini, para desainer akan lebih mudah dalam melakukan monetisasi HKI. Monetisasi adalah upaya untuk menjadikan segala sesuatu yang bernilai menjadi uang. Pada perjanjian kerjasama ini, diatur bahwa bagi hasil untuk inventor adalah 90 persen, sementara UPT Logam mendapatkan 10 persen dari royalty yang didapatkan. Model kerjasama ini menjadi model kerjasama yang cukup menarik bagi para inventor untuk menjual kreasinya sekaligus sebagai stimulant bagi mereka untuk terus berkarya.
- PDIN merupakan rumah berbagai elemen untuk berkarya. Interaksi antar masing masing elemen akan menghasilkan kolaborasi karya yang pada ujungnya akan bermanfaat bagi pengembangan IKM. Salah satu komunitas yang berkarya di PDIN adalah Jogjakarya. Komunitas media digital yang terdiri dari berbagai elemen pelaku industri digital marketing. PDIN bekerjasama dengan Jogjakarya untuk melakukan aktivasi kegiatan PDIN dengan mengadakan pelatihan *Digital Selling* dan pelatihan *live host*. Pelatihan gratis dilaksanakan sepanjang tahun dan terbuka bagi masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah aktivasi PDIN dengan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kedepan, diharapkan kegiatan ini akan memberikan dukungan penjualan kepada produk IKM kota Yogyakarta.
- UPT Logam mengupayakan keterlibatan IKM kedalam rantai pasok industry nasional. Dengan menjadi supplier bagi industry besar, setidaknya IKM dapat mengamankan produksi sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan. Tahun 2024, dua IKM

binaan UPT Logam yaitu ED Alumunium dan TS Alumunium masuk kedalam rantai pasok industry nasional. ED Alumunium melalui anak perusahaannya yang bernama CV C-Maxi telah sukses menjadi supplier industry otomotif Astra. IKM ini memasok *part radiator* bagi ISUZU. Sedangkan TS Alumunium melalui anak perusahaanya yakni PT Aluka telah berhasil mensupply beberapa perusahaan besar, salah satunya menjadi supplier pada Tier 3 PT Astra.

- UPT Logam / PDIN bersama pelaku IKM mengupayakan kerjasama supply produk kerajinan ke Inggris. Proses yang cukup lama dan diinisiasi sejak tahun 2023. Setelah melalui serangkaian koordinasi, pengiriman sampel, audit teknologi, kemampuan, dan proses serta pemenuhan persyaratan administrasi ekspor, pada tahun 2024 pemesanan pengadaan dies telah diajukan oleh pihak importer (Coxlondon). Produk yang akan dibuat adalah *part* berbentuk daun yang nantinya akan dirangkai menjadi lampu. *Proses assembly* akan dilakukan di Inggris. Untuk bisa memproduksi *part* berbentuk daun tersebut, diperlukan mesin *stamping* kapasitas 80 Ton dan seperangkat *dies* (1 *dies blanking* dan 1 *dies forming*). Teknologi *stamping* untuk memproduksi *part* tersebut termasuk didalamnya pembuatan *dies* merupakan teknologi proses yang memerlukan pemahaman proses yang cukup. Diperlukan waktu yang cukup untuk meyakinkan pihak customer dari Inggris bahwa IKM dengan support UPT Logam/PDIN mampu menyediakan *supply* yang diharapkan. Sebelumnya, pihak Coxlondon mendapatkan *supply part* dari Italia. Coxlondon membutuhkan *supplier* dengan kemampuan *craftman skills,* pemahaman *engineering* yang cukup dan *attitude* kerjasama yang baik. Untuk memastikan bahwa *supplier* memiliki itu semua, maka Coxlondon sangat berhati hati dalam memutuskan untuk memberikan pesanan kepada supplier.

2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- **Permasalahan**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perindustrian, koperasi dan UKM maka keluaran (output dan outcome) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompeteitif UKM/IKM. Agar pelayanan, pembinaan dan pengembangan sektor perindustrian, koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dnegan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan keuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tertuang pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan yang menghambat diversifikasi ekonomi yang diselesaikan dengan peningkatan integrasi produk UKM dan IKM dalam rantai pasok industri pariwisata dan festival	Standar, kualitas dan kontinuitas produksi	Keterbatasan wawasan, pengetahuan dan manajemen yang efektif serta biaya tinggi untuk standarisasi
		Keterbatasan teknis	Akses teknologi terbatas
		Keterbatasan keuangan	Akses pembiayaan terbatas
			Koperasi belum dapat menjadi solusi utama pembiayaan bagi UKM/IKM
		Keterbatasan manajemen dan pengelolaan bisnis	Keterbatasan perencanaan dan pengendalian bisnis serta tantangan pemasaran dan branding

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dikaitkan dengan permasalahan pembangunan daerah yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta. Permasalahan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan Dinas Perindustrian, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan yang Menghambat Diversifikasi Ekonomi.

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi fokus utama dalam RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebagai bagian dari amanat yang tertuang di RPJP Nasional maupun RPJPD DIY. Faktanya, kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Yogyakarta justru cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Yogyakarta adalah sebesar 13,01% dan kemudian turun menjadi 12,02% pada tahun 2024. Selain itu, indikator laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren pada tahun 2020-2024 sebesar -1,96%. Kendati demikian, laju pertumbuhan tersebut sudah mengalami peningkatan cukup signifikan sejak pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang sempat mengalami laju penurunan sebesar -3,20%. Adanya keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor industri pengolahan menjadi salah satu pengaruh dalam penurunan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan yang sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri untuk melakukan upscaling terhadap usahanya. Hal ini menjadi dasar bahwa pengembangan industri menengah dan besar tidak menjadi fokus utama di Kota Yogyakarta. Fokus utama pengembangan industri pengolahan di Kota Yogyakarta adalah industri mikro dan kecil.

Pengembangan sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian karena kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama pada kelompok pendapatan terendah dan menengah. Industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh industri mikro dan kecil. Pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar -62,64% per tahun. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebesar

52,87% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 1,03%. Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2024 dengan laju penurunan rata-rata sebesar - 17,36% per tahun. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 14.654 usaha dan kemudian turun menjadi 6.835 usaha pada tahun 2024.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta, maka salah satu lembaga yang dapat dilakukan adalah lembaga koperasi. Koperasi menjadi salah satu lembaga yang berpotensi dioptimalkan perannya sebagai pendorong produktivitas industri mikro dan kecil untuk berkembang, terutama dalam hal permodalan. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara pengembangan industri pengolahan dan pengembangan koperasi. Namun demikian, sejauh ini koperasi di Kota Yogyakarta masih belum secara optimal berkembang ditinjau dari indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta yang masih berkisar di bawah angka 1% selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024 rasio tersebut sebesar 0,8. Bahkan, jika dilihat dari capaian volume usaha dan sisa usaha, selama periode tahun 2020-2024 total capaian volume dan sisa hasil usaha cenderung mengalami penurunan dari 489,5 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 416,7 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan laju penurunan rata-rata per tahun sebesar - 3,95%. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan koperasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pengembangan industri pengolahan khususnya skala mikro dan kecil.

- **Isu Strategis**

Dalam konteks pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika internal wilayah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang dinamis membawa dampak yang kompleks terhadap

arah pembangunan kota, baik dalam bentuk peluang maupun risiko. Pada skala global, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik global berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. Di tingkat nasional, Kota Yogyakarta diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian program-program prioritas nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Sedangkan di tingkat regional, konteks keistimewaan DIY memberikan peranan penting bagi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dalam menjaga keberlanjutan dalam hal tata ruang, pelestarian budaya, maupun ketahanan lingkungan. Memahami dinamika eksternal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi isu lingkungan dinamis berikut dikategorikan dalam tiga tingkatan, meliputi isu global, isu nasional, dan isu regional.

Dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian, Kota Yogyakarta perlu memahami berbagai dinamika eksternal yang memiliki potensi besar mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berbagai risiko global yang berpotensi terjadi menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas kondisi kehidupan perkotaan secara global, termasuk kota Yogyakarta. Isu tersebut antara lain:

1) Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak, sebagaimana ditegaskan dalam Global Risks Report 2025 dan secara hukum internasional diatur dalam Paris Agreement 2015. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Laporan IPCC (Sixth Assessment Report, 2021–2022) memperkuat bukti bahwa intensitas perubahan iklim semakin cepat, dengan dampak yang menyebar di seluruh aspek ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata dan

perubahan pola musim yang signifikan, memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan. Di Kota Yogyakarta, perubahan iklim terpantau dalam bentuk peningkatan intensitas hujan dalam waktu singkat, musim kemarau yang lebih panjang, kenaikan suhu udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Hal ini meningkatkan risiko banjir, memperburuk kondisi permukiman padat, mengancam keberlanjutan kawasan heritage, dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan jasa turut mengalami tekanan akibat ketidakpastian iklim ini. Ketahanan kota menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Integrasi kebijakan pada seluruh aspek pembangunan kota dengan prinsip adaptasi dan mitigasi iklim menjadi keharusan, termasuk dalam rangka konservasi ruang hijau, pengelolaan air berkelanjutan, transisi energi bersih, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Tanpa pembangunan berbasis ketahanan iklim, risiko sosialekonomi, degradasi lingkungan, dan kerusakan warisan budaya kota berpotensi akan semakin meningkat di masa depan. Perubahan iklim tetap menjadi ancaman utama jangka panjang di tingkat global, dengan fenomena semakin meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan suhu, dan kenaikan muka air laut. Kotakota di seluruh dunia menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam konteks Kota Yogyakarta, perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada kawasan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular yang bersifat musiman, serta ancaman terhadap kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya yang sensitif terhadap fenomena perubahan iklim.

2) Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Pembangunan perkotaan di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari komitmen global yang telah disepakati oleh komunitas internasional, khususnya melalui adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA). Keduanya merupakan bagian integral dari upaya membangun masa depan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. SDGs menetapkan kerangka kerja makro pembangunan berkelanjutan lintas sektor hingga tahun 2030, sedangkan NUA memperjelas implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kota dan kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, Kota Yogyakarta tidak dapat mengabaikan pentingnya integrasi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan ke depan. SDGs mengusung 17 tujuan dan 169 target yang mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan institusi. Secara khusus, tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) menjadi sangat relevan bagi Kota Yogyakarta, yang harus memastikan terciptanya ruang hidup yang aman, inklusif, layak huni, serta berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) menjadi dimensi penting dalam konteks tantangan pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta. Dengan batas waktu pencapaian tahun 2030, Kota Yogyakarta dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat integrasi nilai-nilai SDGs ke dalam kebijakan pembangunan ke depan pada setiap sektor yang relevan. Sementara itu, New Urban Agenda (NUA) sebagai hasil Konferensi Habitat III PBB tahun 2016 memberikan penekanan spesifik pada bagaimana kota-kota harus dirancang, dibangun, serta dikelola untuk mendukung pencapaian SDGs. NUA menekankan prinsip hak atas kota, yaitu bahwa ruang kota harus tersedia, diakses, dan dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi atau kota yang

inklusif. Agenda ini juga menegaskan pentingnya tata kelola kota yang partisipatif dan inklusif, pengelolaan ruang publik yang adil, integrasi fungsi sosial-ekonomi- lingkungan dalam perencanaan kota, serta penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana. Dalam konteks Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terus mengalami perkembangan secara spasial dan fungsional, urbanisasi, dan peningkatan mobilitas antarwilayah, penerapan prinsip NUA menjadi tantangan krusial. Kota Yogyakarta tidak hanya perlu mengelola tekanan pembangunan urbanisasi di dalam kota, tetapi juga harus mengkoordinasikan pertumbuhan kawasan lintas wilayah sekitar secara terpadu agar tidak memicu ketimpangan spasial, degradasi lingkungan, atau fragmentasi sosial. Dengan waktu yang semakin terbatas menuju tahun 2030, urgensi untuk mempercepat adopsi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi semakin penting. Tanpa adanya komitmen kuat dan terukur dalam menerjemahkan agenda global ini ke dalam kebijakan lokal untuk pembangunan ke depan, Kota Yogyakarta berisiko menghadapi tantangan serius seperti ketidakmerataan pembangunan, degradasi kualitas lingkungan hidup, krisis identitas budaya, serta melemahnya daya saing kota di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu, penguatan komitmen politik, reformasi tata kelola kota, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan ruang dan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Visi Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, tangguh, dan berdaya saing di masa depan.

3) Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global merupakan kondisi ketika arah dan stabilitas perekonomian dunia sulit diprediksi akibat interaksi kompleks antara faktor geopolitik, dinamika pasar internasional, krisis energi, serta disrupsi rantai pasok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan antarnegara, konflik bersenjata di berbagai

kawasan, serta perubahan kebijakan ekonomi proteksionis dari negara-negara besar. Salah satu contoh signifikan adalah konflik yang terjadi di Eropa Timur, yang berdampak luas terhadap pasokan energi, stabilitas harga pangan, dan perdagangan global. Selain itu, ketegangan dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bentuk saling menaikkan tarif dan pembatasan teknologi menjadi simbol dari *geoeconomic confrontation* yang kian terbuka, di mana masing-masing negara mencoba memproteksi ekonomi dalam negerinya dari pengaruh eksternal. Di kawasan Asia Tenggara, tensi geopolitik di Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan dan dapat berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya memicu ketidakpastian politik dan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur pelayaran internasional dan stabilitas hubungan dagang antarnegara. Di sisi lain, berbagai peristiwa seperti fluktuasi tajam harga komoditas global, inflasi internasional akibat krisis pasokan pasca pandemi, hingga ancaman resesi di negara-negara maju semakin memperbesar kompleksitas tantangan ekonomi global. Semua kondisi ini saling terkait dan berkontribusi terhadap suasana ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk di tingkat domestik dan lokal. Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa pendidikan, dan ekonomi kreatif, ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah risiko strategis. Penurunan minat perjalanan internasional, pembatasan perdagangan barang kreatif, dan perlambatan investasi akibat kehati-hatian pelaku ekonomi dapat secara langsung menekan pertumbuhan sektor unggulan kota. Selain itu, potensi naiknya harga bahan baku impor, terbatasnya pasokan logistik, serta perubahan preferensi konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi global juga dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketergantungan terhadap mobilitas dan arus barang lintas wilayah menjadikan Yogyakarta rentan terhadap gangguan ekonomi

eksternal, yang jika tidak diantisipasi sejak awal, berisiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing kota di tingkat nasional maupun regional.

4) Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat

Salah satu isu utama yang disoroti dalam Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum adalah meningkatnya risiko terkait polarisasi sosial dan penyebaran misinformasi yang meluas di berbagai belahan dunia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mempercayai informasi. Namun, kecepatan disrupsi teknologi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dan hoaks. Ketidaksiapan literasi digital inilah yang menyebabkan ruang publik, terutama media sosial, menjadi arena yang sangat rentan terhadap konflik narasi, disinformasi terorganisir, hingga terpolarisasinya opini masyarakat dalam berbagai isu politik, agama, dan identitas. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga sangat relevan di Indonesia. Beberapa peristiwa politik nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola peningkatan ketegangan sosial yang muncul dari perbedaan pilihan politik. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi dukungan yang sering kali bersifat antagonistik antar kelompok. Serangan verbal, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye berbasis misinformasi menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan pusat budaya yang terbuka, juga berpotensi terpapar oleh dinamika tersebut. Terlebih lagi, dengan tingkat penetrasi internet yang cenderung tinggi,

masyarakat Kota Yogyakarta menjadi kelompok pengguna aktif media sosial yang sangat mungkin terdampak oleh konten-konten provokatif dan narasi yang memecah belah. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan layanan publik di dalam kota juga berpotensi memperbesar jarak sosial antar kelompok masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kombinasi antara disinformasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan ini dapat melemahkan kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar komunitas, serta memperburuk stabilitas sosial dan tata kehidupan perkotaan di Yogyakarta.

Dalam kerangka RPJMN 2025 – 2029, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis di berbagai sektor, mulai dari transformasi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan sosial-ekonomi. Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata nasional, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berdampak pada Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan kota ke depan. Isu – isu nasional tersebut, antara lain:

1) Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana Ketahanan sosial-ekonomi mencerminkan kemampuan suatu komunitas atau kota untuk mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi dasar di tengah tekanan krisis, termasuk krisis pangan dan bencana alam. Kerentanan terhadap ketahanan ini muncul ketika suatu wilayah bergantung pada faktor eksternal untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau ketika struktur sosialekonominya lemah dalam menghadapi shock eksternal. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menargetkan penguatan ketahanan pangan, percepatan pengurangan risiko bencana, serta pengembangan sistem sosial-

ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan iklim. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah urban yang sangat bergantung pada distribusi pangan eksternal. Selain itu, BNPB mencatat lebih dari separuh kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan erupsi vulkanik. Kota Yogyakarta, dengan ketergantungannya pada pasokan pangan dari wilayah sekitarnya dan lokasinya di jalur gempa serta dekat dengan Gunung Merapi, menghadapi kerentanan ganda terhadap krisis pangan dan bencana. Tekanan terhadap sistem distribusi pangan nasional atau terjadinya bencana besar dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ke depan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan perkotaan Yogyakarta.

2) Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya

Dalam Konteks Pariwisata Nasional, pariwisata berbasis budaya merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pada keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas lokal. Pariwisata budaya tidak hanya berkontribusi pada pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas nasional dan diplomasi budaya global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor pariwisata budaya dipandang sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. RPJMN 2025–2029 menetapkan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas nasional, dengan target kontribusi terhadap PDB mencapai 5,5% pada 2029. Data Kemenparekraf menunjukkan adanya tren pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang didorong oleh peningkatan minat terhadap destinasi budaya autentik.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Borobudur–Yogyakarta–Prambanan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada pelestarian nilai budaya dan warisan dunia. Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tersebut. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan sumbu filosofi, kawasan cagar budaya, serta berbagai kekayaan tradisi seni-budaya memberikan keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing kota. Namun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pariwisata, kualitas layanan, dan pelestarian budaya di tengah dinamika pariwisata yang masih dominan berorientasi pada konsep mass tourism perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kota ke depan sehingga tidak kontradiktif dengan upaya pelestarian kawasan yang terus diperkuat.

3) Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, transformasi digital, program makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis, mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan cepat. Konsep ini menekankan pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal. Secara nasional, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, digitalisasi 80% layanan publik pada 2029, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar secara universal.

   Data BPS menunjukkan bahwa hingga 2023, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di sekitar 1,5%, dengan variasi antarwilayah yang cukup tinggi. Transformasi digital juga masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah. Sebagai kota dengan tingkat pendidikan dan literasi digital

yang relatif tinggi, serta basis ekonomi kreatif yang kuat, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian program-program nasional tersebut. Dengan karakteristik masyarakat yang cenderung progresif dan jaringan komunitas yang aktif, Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh implementasi program nasional berbasis kekuatan lokal yang adaptif dan inovatif.

Selain dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, pembangunan Kota Yogyakarta juga sangat terkait dengan perkembangan kebijakan, fenomena, dan agenda strategis di tingkat regional, khususnya di wilayah DIY. Berbagai kebijakan kewilayahan, penetapan status warisan budaya dunia, hingga dinamika pembangunan sosial-ekonomi di DIY menjadi faktor penting yang membentuk peluang, tantangan, dan risiko bagi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis regional menjadi krusial dalam merumuskan arah pembangunan kota yang sinkron dengan konteks keistimewaan daerah dan dinamika regional yang terjadi.

1) Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia
   Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2023 menandai pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Konsep Sumbu Filosofi berakar pada tata ruang kosmologis dan nilai-nilai budaya Keraton Yogyakarta yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam dan pencipta. Status warisan dunia membawa tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, keaslian, dan kesinambungan nilai-nilai budaya tersebut melalui pengelolaan ruang yang sensitif dan berkelanjutan. Di tingkat regional, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan Sumbu Filosofi melalui Peraturan Gubernur dan rencana pengelolaan terintegrasi lintas kabupaten/kota.
   Pengelolaan kawasan ini menuntut sinergi antarsektor dalam menjaga nilai budaya, kualitas ruang, dan fungsi sosial-ekonomi

kawasan. Tantangan yang muncul meliputi tekanan pembangunan, pertumbuhan pariwisata massal, dan perubahan sosial di kawasan sekitarnya. Bagi Kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi utama Sumbu Filosofi, implikasi dari penetapan ini sangat besar. Kota harus menyesuaikan kebijakan pembangunan ruang, pengelolaan kegiatan sosial-budaya, serta tata kelola pariwisata agar tidak mengganggu integrasi kawasan. Status warisan dunia juga membuka peluang untuk penguatan citra internasional Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dunia, tetapi sekaligus menuntut konsistensi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan ruang bersejarah. Isu – isu lingkungan regional yang mempengaruhi pembangunan di Kota Yogyakarta, antara lain:

2) Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional

Perkembangan wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dan meluas lintas batas administrasi kota/kabupaten. Konsep Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dalam RTRW DIY mengindikasikan pembentukan struktur metropolitan berbasis multi-nuclei yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Bantul, dan sebagian Kulon Progo. Fenomena ini mencerminkan proses urbanisasi regional yang cepat, disertai dengan perubahan fungsi ruang, peningkatan mobilitas, dan pertumbuhan kebutuhan layanan perkotaan. Di tingkat regional, dinamika ini menuntut penguatan integrasi perencanaan, pengelolaan ruang, dan pembangunan infrastruktur antarwilayah. RTRW DIY 2021–2041 menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan urban sprawl, penguatan konektivitas kawasan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kawasan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan akses, degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap sistem pelayanan kota. Kota Yogyakarta, sebagai pusat utama Kawasan Perkotaan Yogyakarta, berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak dinamika regional ini. Beban pelayanan, tekanan terhadap ruang kota, serta kebutuhan koordinasi

antarwilayah menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Pada saat yang sama, konektivitas yang semakin baik dengan wilayah sekitar membuka peluang penguatan peran Yogyakarta sebagai pusat budaya, ekonomi kreatif, dan pendidikan regional.

3) Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta Konsep Satuan Ruang Strategis (SRS) dalam kerangka keistimewaan DIY berfungsi untuk melindungi, mengelola, dan mengoptimalkan kawasan kawasan dengan nilai strategis tinggi, baik dari aspek budaya, sejarah, maupun pengelolaan ruang. Di DIY, SRS menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan karakter wilayah, memperkuat identitas budaya, serta mengintegrasikan pelestarian nilai lokal dalam perencanaan pembangunan. Penetapan SRS menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan keistimewaan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Di tingkat regional, kebijakan penetapan dan pengelolaan SRS telah dituangkan dalam Pergub DIY dan RTRW DIY, mencakup pengaturan ketat terhadap pemanfaatan ruang di kawasan-kawasan strategis, termasuk dalam kawasan perkotaan. Empat SRS utama di Kota Yogyakarta—yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, dan KCB Kotabaru—telah ditetapkan dan memiliki regulasi ketat terkait pemanfaatan ruang dan pelestarian budaya. Bagi Kota Yogyakarta, pengelolaan SRS menjadi isu penting dalam pembangunan kota ke depan. Keterpaduan antara rencana tata ruang kota (RDTR Kota Yogyakarta) dengan ketentuan pelestarian dalam kawasan SRS harus terus diperkuat untuk menghindari konflik penggunaan ruang. Tantangan lain meliputi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan bersejarah tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta menentukan isu – isu strategis. Isu strategis merupakan formulasi tantangan dan permasalahan utama yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah khususnya pada urusan koperasi, UKM dan perindustrian. Rumusan strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tertuang pada Tabel.2.6.

Tabel 2.6 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Kota Yogyakarta memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan festival dan event, baik pada skala lokal, regional, nasional bahkan internasional.	Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan yang menghambat diversifikasi ekonomi yang diselesaikan dengan peningkatan integrasi produk UKM dan IKM dalam rantai pasok industri pariwisata dan festival	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota 2. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 3. Ketidakpastia n Kondisi Ekonomi Global 4. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	1. Kerentanan Ketahanan Sosial- Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana 2. Penguata n Daya Saing Pariwisata Budaya 3. Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	1. Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia 2. Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional 3. Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	1. Belum optimalnya produk industri mikro dan kecil masuk ke dalam rantai pasok industri pariwisata maupun industri lainnya 2. Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dimana koperasi belum mampu menjadi solusi permodalan Industri Mikro Kecil 3. Dukungan kebijakan pembangunan terkait industri, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan 4. Belum optimalnya daya saing UKM/IKM

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkantingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran Renstra merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota Yogyakarta yang dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program kerja, menentukan arah dan prioritas program kerja. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah uang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan pula indikator kinerja sebagai pengukur capaian kinerja yang terlah direncanakan. Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta periode 2025 – 2029 beserta indikatornya tertuang pada Tabel.3.1.

Tabel 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
- Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi, dan Industri		Rasio Kewirausahaan (Persentase)	-	5.158-5.162	5.165-5.169	5.172-5.176	5.179-5.183	5.186-5.192	5.193-5.197	
			Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) (Persentase)	0.80	0.860-0.875	0.862-0.890	0.864-0.905	0.866-0.920	0.868-0.935	0.870-0.950	
			Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (Persentase)	-	12.2-12.276	12.2-12.352	12.2-12.428	12.2-12.504	12.202-12.580	12.202-12.656	
		Meningkatnya produktivitas sektor UMKM	Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10% (Persentase)	-	55.00	56.00	57.14	58.67	60.50	62.59	
		Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi	Nilai Omset Koperasi tahun n (Rp)	397206633350	397603839983	398001443823	398399445267	398797844712	399196642557	439116306813	
		Meningkatnya Produktivitas sektor Industri	Proporsi IKM Naik Kelas (Persentase)	10	10	10	10	10	10	10	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi dan Industri, yang diukur dengan indikator:

- Rasio Kewirausahaan
- Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
- Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran:

- Meningkatnya produktivitas sektor UMKM, dengan indikator kinerja Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10%;
- Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi, dengan indikator kinerja Nilai Omset Koperasi tahun n;
- Meningkatnya Produktivitas sektor Industri, dengan indikator kinerja Proporsi IKM Naik Kelas;
- Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang Baik dan Adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Predikat).

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan ini harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi merupakan langkah – langkah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan kebijakan merupakan penjabaran dari strategi. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasian sasaran. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pengembangan maupun pelaksanaan program

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029 yaitu:

- Meningkatnya produktivitas sektor UMKM;
- Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi;
- Meningkatnya Produktivitas sektor Industri;
- Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang Baik dan Adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Predikat).

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pasar dan ekspansi digital.

   Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:
   - Memfasilitasi Koperasi/UKM/IKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya melalui berbagai aktivitas promosi dan pemasaran.
   - Peningkatan akses terhadap pembiayaan.

   Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:
   - Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan;
   - Memfasilitasi informasi akses ke berbagai sumber pembiayaan.
   - Perluasan kemitraan strategis.

   Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:
   - Membangun kemitraan antara Koperasi/UKM/IKM dengan perusahaan besar, maupun lembaga terkait lainnya.

2. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi/UKM/IKM.

   Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:
   - Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengurus/anggota Koperasi dan pelaku UKM/IKM;

- Meningkatkan literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi;
- Mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas dalam produk dan layanan Koperasi/UKM/IKM.

3. Peningkatan kualitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

   Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:
   - Menata kelembagaan dan tatakelola Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta;
   - Meningkatkan manajemen aparatur Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta;
   - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta;
   - Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral;
   - Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.

Langkah selanjutnya adalah penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Menguatkan kelembagaan koperasi dan pelaku UKM/IKM yang transparan, kapabel, akuntabel dan berfokus pada pelayanan	Membangun koperasi dan UKM/IKM yang siap terhadap perkembangan teknologi	Mendorong inovasi yang yang selaras dengan kearifan lokal	Menguatkan branding dan nilai tambah	Mengembangkan jaringan pemasaran dalam dan luar daerah

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra dapat dilihat pada Tabel.3.3

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Ket
1.	Peningkatan produktivitas sektor UMKM	Menumbuhkan wirausaha baru	Memfasilitasi Koperasi/UKM/IKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya melalui berbagai aktivitas promosi dan pemasaran	
		Meningkatkan UMKM naik kelas	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan	
			Memfasilitasi informasi akses ke berbagai sumber pembiayaan	
2.	Pemberdayaan koperasi sebagai penggerak Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan kapasitas dan kinerja koperasi yang berkelanjutan	Membangun kemitraan antara Koperasi/UKM/IKM dengan perusahaan besar, maupun lembaga terkait lainnya	
3.	Peningkatan produktivitas sektor industri	Meningkatkan kualitas dan daya saing IKM	Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengurus/anggota Koperasi dan pelaku UKM/IKM	
			Meningkatkan literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi	
			Mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas dalam produk dan layanan Koperasi/UKM/IKM	
4.	Transformasi tata kelola	Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Menata kelembagaan dan tatakelola Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	
			Meningkatkan manajemen aparatur Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	
			Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	
			Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	
			Meningkatkan kualitas pelayanan arsip	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar- benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada (1) upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas pembangunan daerah dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program merupakan kumpulan seluruh program kerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Program disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta menyelenggarakan 4 program terkait urusan koperasi, 2 program terkait urusan UKM, 3 program terkait urusan perindustrian dan 1 program penunjang urusan.

Urusan koperasi diampu 4 program, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/KSP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Program Penilaian Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari satu kegiatan yakni Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Penilaian Kesehatan KSP/KSP Koperasi juga terdiri dari satu kegiatan yakni Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari satu kegiatan yakni Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi

Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari satu kegiatan yakni Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan UMKM diampu dua program yakni Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Sedangkan Program Pengembangan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Urusan perindustrian diampu tiga program antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota terdiri dari satu kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari satu kegiatan yakni Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.

4.2 Uraian Kegiatan

Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk tujuan-tujuan strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025 – 2029. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta antara lain:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya

dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
6. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
7. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
8. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
11. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13. Kegiatan Administrasi Barang Milik Pemerintah
14. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
16. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel.4.1 dan Tabel.4.2. berikut:

Tabel 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.467.767.455,00		10.680.674.907,00		10.951.770.306,00		11.249.501.248,00		11.636.882.319,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.190.198.135,00		6.316.102.662,00		6.476.417.099,00		6.652.482.675,00		6.881.563.574,00	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perinkopukm	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Predikat)	A	A	A	6.190.198.135,00	A	6.316.102.662,00	A	6.476.417.099,00	A	6.652.482.675,00	A	6.881.563.574,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Nilai)	4.251	4.251	4.251		4.251		4.251		4.251		4.251		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Nilai)	82.36	82.46	82.56		82.66		82.76		82.86		82.96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					95.130.000,00		97.064.881,00		99.528.568,00		102.234.317,00		105.754.796,00	
Meningkatnya akuntabilitas koperasi	Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik (Orang)	28.90	30.35	31.79	95.130.000,00	33.24	97.064.881,00	34.68	99.528.568,00	36.13	102.234.317,00	37.57	105.754.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					68.939.600,00		70.341.786,00		72.127.191,00		74.088.015,00		76.639.266,00	
Meningkatnya kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat (Koperasi)	13.29	13.87	14.45	68.939.600,00	15.03	70.341.786,00	15.61	72.127.191,00	16.18	74.088.015,00	16.76	76.639.266,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					324.871.400,00		331.479.069,00		339.892.624,00		349.132.825,00		361.155.353,00	
Meningkatnya kapasitas SDM koperasi	Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi (Persentase)	7.23	9.10	10.98	324.871.400,00	12.86	331.479.069,00	15.27	339.892.624,00	17.68	349.132.825,00	20.09	361.155.353,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00	
Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya					434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.155.559.220,00		2.199.401.866,00		2.255.226.777,00		2.316.536.572,00		2.396.307.435,00	
Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase wirausaha baru (Persentase)	1.46	2.19	2.93	2.155.559.220,00	3.66	2.199.401.866,00	4.39	2.255.226.777,00	5.12	2.316.536.572,00	5.85	2.396.307.435,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.199.057.900,00		1.223.445.943,00		1.254.499.277,00		1.288.603.649,00		1.332.977.231,00	
Meningkatnya UMKM naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas (Persentase)	10	10	10	1.199.057.900,00	10	1.223.445.943,00	10	1.254.499.277,00	10	1.288.603.649,00	10	1.332.977.231,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					5.312.353.680,00		5.420.403.433,00		5.557.983.358,00		5.709.080.719,00		5.905.675.196,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					627.334.400,00		640.093.966,00		656.340.742,00		674.183.788,00		697.399.576,00	
Meningkatnya layanan industri	Pendapatan UPT Desain dan Industri (Rp)	566776486	614075000	627334400	627.334.400,00	657334400	640.093.966,00	687334400	656.340.742,00	707334400	674.183.788,00	727334400	697.399.576,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.630.236.180,00		4.724.412.115,00		4.844.326.485,00		4.976.022.624,00		5.147.373.953,00	
Meningkatnya kualitas sumber daya industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi (Persentase)	5.98	5.51	5.65	4.630.236.180,00	5.79	4.724.412.115,00	5.92	4.844.326.485,00	6.04	4.976.022.624,00	6.16	5.147.373.953,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					15.331.700,00		15.643.537,00		16.040.599,00		16.476.673,00		17.044.054,00	
Meningkatnya IKM yang berizin industri	Persentase IKM yang berizin industri (Persentase)	42.62	62.52	73.54	15.331.700,00	75.64	15.643.537,00	76.38	16.040.599,00	77.09	16.476.673,00	77.75	17.044.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					39.451.400,00		40.253.815,00		41.275.532,00		42.397.634,00		43.857.613,00	
Ter-updatenya Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update (Persentase)	53.55	58.86	63.08	39.451.400,00	66.51	40.253.815,00	69.36	41.275.532,00	71.76	42.397.634,00	73.82	43.857.613,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					15.780.121.135,00		16.101.078.340,00		16.509.753.664,00		16.958.581.967,00		17.542.557.515,00	

Tabel 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
- Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi, dan Industri				Rasio Kewirausahaan		
					Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)		
					Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan		
		Meningkatnya produktivitas sektor UMKM			Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10%		
			Meningkatnya Wirausaha Baru		Persentase wirausaha baru	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

			Meningkatnya UMKM naik kelas		Persentase UMKM Naik Kelas	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya pengembangan UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi			Nilai Omset Koperasi tahun n		
			Meningkatnya akuntabilitas koperasi		Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kesehatan koperasi		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas SDM koperasi		Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya SDM koperasi yang tersertifikasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya	Meningkatnya permberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
						2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Meningkatnya Produktivitas sektor Industri			Proporsi IKM Naik Kelas		
			Meningkatnya layanan industri		Pendapatan UPT Desain dan Industri	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas layanan UPT Desain dan Industri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3.31.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3.31.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas sumber daya industri		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya IKM yang berizin industri		Persentase IKM yang berizin industri	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Meningkatnya pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Ter-updatenya Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Ter-updatenya data IKM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perinkopukm		Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perinkopukm	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KET**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Perinkopukm	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KET**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja, maka disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan sub kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.467.767.455		10.680.674.907		10.951.770.306		11.249.501.248		11.636.882.319		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.772.496.556		6.190.198.135		6.316.102.662		6.476.417.099		6.652.482.675		6.881.563.574		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perinkopukm	Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4.251	4.251		4.251	6.190.198.135	4.251	6.316.102.662	4.251	6.476.417.099	4.251	6.652.482.675	4.251	6.881.563.574	2.17.3.31.0. 00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	82.36	82,46		82.56		82.66		82.76		82.86		82.96			
	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	A	A		A		A		A		A		A			
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.782.900		13.092.900,00		13.359.209		13.698.266		14.070.723		14.555.318		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Perinkopukm	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm	100	100		100	13.092.900	100	13.359.209	100	13.698.266	100	14.070.723	100	14.555.318		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm	100	100		100		100		100		100		100			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.360.000		6.500.000		6.632.210		6.800.535		6.985.442		7.226.021		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5		5	6.500.000	5	6.632.210	5	6.800.535	5	6.985.442	5	7.226.021		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.752.900		3.527.900		3.599.657		3.691.017		3.791.376		3.921.951		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		4	3.527.900,00	4	3.599.657	4	3.691.017	4	3.791.376	4	3.921.951		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.670.000		1.805.000		1.841.714		1.888.456		1.939.804		2.006.610		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7		7	1.805.000	7	1.841.714	7	1.888.456	7	1.939.804	7	2.006.610		
2.17.01.2.01.0009-Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		1.260.000		1.285.628		1.318.258		1.354.101		1.400.736		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	0	1	1.260.000	1	1.285.628	1	1.318.258	1	1.354.101	1	1.400.736		

2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.588.982.000		5.125.131.071		5.229.376.237		5.362.097.806		5.507.893.245		5.697.585.089		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan keuangan dan aset Dinas Perinkopukm	5	5	5.588.982.000	5	5.125.131.071	5	5.229.376.237	5	5.362.097.806	5	5.507.893.245	5	5.697.585.089		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.586.122.000		5.121.919.571		5.226.099.415		5.358.737.818		5.504.441.900		5.694.014.879,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33	5.586.122.000	34	5.121.919.571	34	5.226.099.415	34	5.358.737.818	34	5.504.441.900,	34	5.694.014.879,00		
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				660.000		1.099.500,00		1.121.864,00		1.150.337,00		1.181.614,00		1.222.309,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	660.000	1	1.099.500,00	1	1.121.864,00	1	1.150.337,00	1	1.181.614,00	1	1.222.309,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.200.000		2.112.000,00		2.154.958,00		2.209.651,00		2.269.731,00		2.347.901,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12			12	2.112.000,00	12	2.154.958,00	12	2.209.651,00	12	2.269.731,00	12	2.347.901,00		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				990.000		1.860.000,00		1.897.832,00		1.946.000,00		1.998.911,00		2.067.753,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan keuangan dan aset Dinas Perinkopukm	5	5	990.000	2	1.860.000,00	2	1.897.832,00	2	1.946.000,00	2	1.998.911,00	2	2.067.753,00		
2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				495.000		1.260.000,00		1.285.628,00		1.318.258,00		1.354.101,00		1.400.736,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1			1	1.260.000,00	1	1.285.628,00	1	1.318.258,00	1	1.354.101,00	1	1.400.736,00		
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				495.000		600.000,00		612.204,00		627.742,00		644.810,00		667.017,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2			2	600.000,00	2	612.204,00	2	627.742,00	2	644.810,00	2	667.017,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				495.000		600.000,00		612.204,00		627.742,00		644.810,00		667.017,00		

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Perinkopukm	Indeks Profesional ASN	86	86	495.000	86	600.000,00	86	612.204,00	86	627.742,00	86	644.810,00	86	667.017,00		
2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				495.000		600.000,00		612.204,00		627.742,00		644.810,00		667.017,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16		495.000	16	600.000,00	16	612.204,00	16	627.742,00	16	644.810,00	16	667.017,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.025.670		168.578.735,00		172.007.626,00		176.373.181,00		181.168.767,00		187.408.219,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perinkopukm	75	75	167.025.670	75,50	168.578.735,00	76	172.007.626,00	76,50	176.373.181,00	77	181.168.767,00	77,50	187.408.219,00		

2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.699.170		71.087.235,00		72.533.149,00		74.374.041,00		76.396.271,00		79.027.358,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6		79.699.170	6	71.087.235,00	6	72.533.149,00	6	74.374.041,00	6	76.396.271,00	6	79.027.358,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.142.500		25.047.500,00		25.556.966,00		26.205.602,00		26.918.132,00		27.845.193,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3		22.142.500	3	25.047.500,00	3	25.556.966,00	3	26.205.602,00	3	26.918.132,00	3	27.845.193,00		
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.920.000		1.920.000,00		1.959.053,00		2.008.774,00		2.063.392,00		2.134.455,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		1.920.000	2	1.920.000,00	2	1.959.053,00	2	2.008.774,00	2	2.063.392,00	2	2.134.455,00		
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.264.000		70.524.000,00		71.958.458,00		73.784.764,00		75.790.972,00		78.401.213,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3		63.264.000	3	70.524.000,00	3	71.958.458,00	3	73.784.764,00	3	75.790.972,00	3	78.401.213,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan B arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.025.636		29.310.429,00		29.902.502,00		30.673.176,00		31.478.976,00		32.532.508,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai Penguatan keuangan dan aset Dinas Perinkopukm	5	5	77.025.636	5	29.310.429,00	5	29.902.502,00	5	30.673.176,00	5	31.478.976,00	5	32.532.508,00		

keuangan dan aset																
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				71.500.000		25.206.968,00		25.898.557,00		26.566.037,00		27.263.941,00		28.176.405,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		71.500.000	1	25.206.968,00	1	25.898.557,00	1	26.566.037,00	1	27.263.941,00	1	28.176.405,00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.525.636		4.103.461,00		4.003.945,00		4.107.139,00		4.215.035,00		4.356.103,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		5.525.636	1	4.103.461,00	1	4.003.945,00	1	4.107.139,00	1	4.215.035,00	1	4.356.103,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				581.470.000		611.112.000,00		623.542.018,00		639.367.514,00		656.751.917,00		679.370.453,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		581.470.000	2	611.112.000,00	2	623.542.018,00	2	639.367.514,00	2	656.751.917,00	2	679.370.453,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6			6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2			2		2		2		2		2			

2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.360.000		1.050.000,00		1.071.357,00		1.098.548,00		1.128.418,00		1.167.280,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.360.000	2	1.050.000,00	2	1.071.357,00	2	1.098.548,00	2	1.128.418,00	2	1.167.280,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.240.000		3.480.000,00		3.550.783,00		3.640.902,00		3.739.898,00		3.868.700,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		3.240.000	2	3.480.000,00	2	3.550.783,00	2	3.640.902,00	2	3.739.898,00	2	3.868.700,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				575.870.000		606.582.000,00		618.919.878,00		634.628.064,00		651.883.601,00		674.334.473,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6		575.870.000	6	606.582.000,00	6	618.919.878,00	6	634.628.064,00	6	651.883.601,00	6	674.334.473,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.725.350		240.513.000,00		245.405.034,00		251.633.414,00		258.475.326,00		267.377.217,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm	20		336.725.350	20	240.513.000,00	20	245.405.034,00	20	251.633.414,00	20	258.475.326,00	20	267.377.217,00		

2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				28.128.800		28.941.000,00		29.529.660,00		30.279.123,00		31.102.412,00		32.173.579,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		28.128.800	1	28.941.000,00	1	29.529.660,00	1	30.279.123,00	1	31.102.412,00	1	32.173.579,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.868.500		126.572.000,00		129.146.474,00		132.424.212,00		136.024.826,00		140.709.521,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20		116.868.500	20	126.572.000,00	20	129.146.474,00	20	132.424.212,00	20	136.024.826,00	20	140.709.521,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				191.728.050		85.000.000,00		86.728.900,00		88.930.079,00		91.348.088,00		94.494.117,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1		191.728.050	1	85.000.000,00	1	86.728.900,00	1	88.930.079,00	1	91.348.088,00	1	94.494.117,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				157.573.800		95.130.000,00		97.064.881,00		99.528.568,00		102.234.317,00		105.754.796,00		
Meningkatnya akuntabilitas koperasi	Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	28.90		157.573.800	31.79	95.130.000,00	33.24	97.064.881,00	34.68	99.528.568,00	36.13	102.234.317,00	37.57	105.754.796,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustria n Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				157.573.800		95.130.000,00		97.064.881,00		99.528.568,00		102.234.317,00		105.754.796,00		
Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	100	105	157.573.800	110	95.130.000,00	115	97.064.881,00	120	99.528.568,00	125	102.234.317,00	130	105.754.796,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				157.573.800		95.130.000,00		97.064.881,00		99.528.568,00		102.234.317,00		105.754.796,00		

Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	115		157.573.800	115	95.130.000,00	115	97.064.881,00	115	99.528.568,00	115	102.234.317,00	115	105.754.796,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				85.000.000		68.939.600,00		70.341.786,00		72.127.191,00		74.088.015,00		76.639.266,00		
Meningkatnya kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	13.29		85.000.000	14.45	68.939.600,00	15.03	70.341.786,00	15.61	72.127.191,00	16.18	74.088.015,00	16.76	76.639.266,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				85.000.000		68.939.600,00		70.341.786,00		72.127.191,00		74.088.015,00		76.639.266,00		
Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Jumlah koperasi dengan predikat sehat	46	48	85.000.000	50	68.939.600,00	52	70.341.786,00	54	72.127.191,00	56	74.088.015,00	58	76.639.266,00		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				85.000.000		68.939.600,00		70.341.786,00		72.127.191,00		74.088.015,00		76.639.266,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	46		85.000.000	50	68.939.600,00	52	70.341.786,00	54	72.127.191,00	56	74.088.015,00	58	76.639.266,00		

2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				417.921.900		324.871.400,00		331.479.069,00		339.892.624,00		349.132.825,00		361.155.353,00		
Meningkatnya kapasitas SDM koperasi	Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi	7.23		417.921.900	10.98	324.871.400,00	12.86	331.479.069,00	15.27	339.892.624,00	17.68	349.132.825,00	20.09	361.155.353,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				417.921.900		324.871.400,00		331.479.069,00		339.892.624,00		349.132.825,00		361.155.353,00		
Meningkatnya SDM koperasi yang tersertifikasi	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi	150	189	417.921.900	228	324.871.400,00	267	331.479.069,00	317	339.892.624,00	367	349.132.825,00	417	361.155.353,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				417.921.900		324.871.400,00		331.479.069,00		339.892.624,00		349.132.825,00		361.155.353,00		

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150		417.921.900	228	324.871.400,00	267	331.479.069,00	317	339.892.624,00	367	349.132.825,00	417	361.155.353,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				821.377.550		434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00		
Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya				821.377.550		434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				821.377.550		434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27		821.377.550	39	434.011.200,00	45	442.838.700,00	50	454.078.770,00	55	466.423.195,00	60	482.484.664,00		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				821.377.550		434.011.200,00		442.838.700,00		454.078.770,00		466.423.195,00		482.484.664,00		

Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27		821.377.550	39	434.011.200,00	45	442.838.700,00	50	454.078.770,00	55	466.423.195,00	60	482.484.664,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2.462.759.245		2.155.559.220,00		2.199.401.866,00		2.255.226.777,00		2.316.536.572,00		2.396.307.435,00		
Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase wirausaha baru	1.46		2.462.759.245	2.93	2.155.559.220	3.66	2.199.401.866	4.39	2.255.226.777	5.12	2.316.536.572	5.85	2.396.307.435	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				2.462.759.245		2.155.559.220		2.199.401.866		2.255.226.777		2.316.536.572		2.396.307.435		
Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Jumlah wirausaha baru	100	150	2.462.759.245	200	2.155.559.220	250	2.199.401.866	300	2.255.226.777	350	2.316.536.572	400	2.396.307.435		

2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				96.770.000		89.455.707		91.275.177		93.591.911		96.136.267		99.446.758		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	400		96.770.000	400	89.455.707	400	91.275.177	400	93.591.911	400	96.136.267	400	99.446.758		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1.712.440.145		1.323.728.917		1.350.652.685		1.384.934.763		1.422.585.108		1.471.572.395		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100		1.712.440.145	100	1.323.728.917,00	100	1.350.652.685,00	100	1.384.934.763,00	100	1.422.585.108,00	100	1.471.572.395,00		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				653.549.100		742.374.596,00		757.474.004,00		776.700.103,00		797.815.197,00		825.288.282,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	36000		653.549.100	36000	742.374.596,00	36000	757.474.004,00	36000	776.700.103,00	36000	797.815.197,00	36000	825.288.282,00		

2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.898.212.000		1.199.057.900		1.223.445.943		1.254.499.277		1.288.603.649		1.332.977.231		
Meningkatnya UMKM naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	10		1.898.212.000	10	1.199.057.900	10	1.223.445.943	10	1.254.499.277	10	1.288.603.649	10	1.332.977.231	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.898.212.000		1.199.057.900		1.223.445.943		1.254.499.277		1.288.603.649		1.332.977.231		
Meningkatnya pengembangan UMKM	Jumlah pelaku UMKM naik kelas	10	15	1.898.212.000	20	1.199.057.900	25	1.223.445.943	30	1.254.499.277	35	1.288.603.649	40	1.332.977.231		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				1.898.212.000		1.199.057.900		1.223.445.943		1.254.499.277		1.288.603.649		1.332.977.231		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10		1.898.212.000	20	1.199.057.900	25	1.223.445.943	30	1.254.499.277	35	1.288.603.649	40	1.332.977.231		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						5.312.353.680		5.420.403.433		5.557.983.358		5.709.080.719		5.905.675.196		

3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				888.356.248		627.334.400		640.093.966		656.340.742		674.183.788		697.399.576		
Meningkatnya layanan industri	Pendapatan UPT Desain dan Industri	566776486		888.356.248	627334400	627.334.400	657334400	640.093.966	687334400	656.340.742	707334400	674.183.78	727334400	697.399.576	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3.31.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				888.356.248		627.334.400		640.093.966		656.340.742,00		674.183.788,00		697.399.576,00		
Meningkatnya kualitas layanan UPT Desain dan Industri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		888.356.248	1	627.334.400	1	640.093.966	1	656.340.742	1	674.183.788	1	697.399.576		
3.31.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				888.356.248		627.334.400		640.093.966		656.340.742		674.183.788		697.399.576		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		888.356.248	1	627.334.400	1	640.093.966	1	656.340.742	1	674.183.788	1	697.399.576		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						4.630.236.180		4.724.412.115		4.844.326.485		4.976.022.624		5.147.373.953		

Meningkatnya kualitas sumber daya industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	5.98			5.65	4.630.236.180,00	5.79	4.724.412.115,00	5.92	4.844.326.485,00	6.04	4.976.022.624,00	6.16	5.147.373.953,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						4.630.236.180		4.724.412.115		4.844.326.485		4.976.022.624		5.147.373.953		
Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	Jumlah pelaku UKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	40	50		50	4.630.236.180	50	4.724.412.115,00	50	4.844.326.485	50	4.976.022.624	50	5.147.373.953		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				434.084.400		243.484.000,00		248.031.636,00		254.327.140,00		261.241.187,00		270.237.132,00		

Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2		434.084.400	4	243.484.000,00	4	248.031.636,00	4	254.327.140,00	4	261.241.187,00	4	270.237.132,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				228.759.000		120.059.600,00		122.362.273,00		125.468.055,00		128.878.985,00		133.316.985,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2		228.759.000	2	120.059.600	2	122.362.273	2	125.468.055	2	128.878.985	2	133.316.985		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.208.401.100		4.266.692.580		4.354.018.206		4.464.531.290		4.585.902.452		4.743.819.836		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4		5.208.401.100	4	4.266.692.580	4	4.354.018.206,00	4	4.464.531.290	4	4.585.902.452	4	4.743.819.836		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				17.125.000		15.331.700,00		15.643.537,00		16.040.599,00		16.476.673,00		17.044.054,00		
Meningkatnya IKM yang berizin industri	Persentase IKM yang berizin industri	42.62		17.125.000	73.54	15.331.700,00	75.64	15.643.537,00	76.38	16.040.599,00	77.09	16.476.673,00	77.75	17.044.054,00	2.17.3.31.0. 00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				17.125.000		15.331.700,00		15.643.537,00		16.040.599,00		16.476.673,00		17.044.054,00		
Meningkatnya pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA	Jumlah pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA	3	28	17.125.000	53	15.331.700,00	78		103	16.040.599,00	128	16.476.673,00	153	17.044.054,00		
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				17.125.000		15.331.700,00		15.643.537,00		16.040.599,00		16.476.673,00		17.044.054,00		

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2		17.125.000	1	15.331.700,00	1	15.643.537,00	1	16.040.599,00	1	16.476.673,00	1	17.044.054,00		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				54.070.000		39.451.400,00		40.253.815,00		41.275.532,00		42.397.634,00		43.857.613,00		
Ter-updatenya Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	53.55		54.070.000	63.08	39.451.400,00	66.51	40.253.815,00	69.36	41.275.532,00	71.76	42.397.634,00	73.82	43.857.613,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				54.070.000	40	39.451.400,00	40	40.253.815,00	40	41.275.532,00	40	42.397.634,00	40	43.857.613,00		

Ter-updatenya data IKM	Jumlah data IKM yang ter-update	166	40	54.070.000	40	39.451.400,00	40	40.253.815,00	40	41.275.532,00	40	42.397.634,00	40	43.857.613,00		
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				54.070.000		39.451.400,00		40.253.815,00		41.275.532,00		42.397.634,00		43.857.613,00		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	54.070.000	1	39.451.400,00	1	40.253.815,00	1	41.275.532,00	1	42.397.634,00	1	43.857.613,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioitas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Strategis Wali Kota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Penumbuhan wirausaha muda	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tumbuhnya wirausaha baru	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Melatih dan melakukan pendampingan bagi pelaku usaha baru (HBC, KaMU, SAKA Wirausaha)
					Fasilitasi tempat pemasaran bagi alumni pelatihan HBC dan KaMU
					Fasilitasi pemasaran produk kuliner melalui Layanan Nglarisi di aplikasi JSS
2	Bela Beli Produk Warga	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	UMKM naik kelas	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran produk IKM/UKM Memfasilitasi kemitraan UMKM
		2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Mengembangkan koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong Koperasi ke Sektor Riil
3	Pemajuan Ekonomi Kreatif	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Layanan jasa pembuatan dan produksi prototype
					Layanan konsultasi desain dan bisnis
					Bank data desainer
					Diversifikasi dan inovasi produk
		2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	UMKM naik kelas	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran produk IKM/UKM Memfasilitasi kemitraan UMKM

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.17.3.31.0.0 0.01.0000 - Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
2.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	-	5.158-5.162	5.165-5.169	5.172-5.176	5.179-5.183	5.186-5.192	5.193-5.197	
3.	Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	Persentase	0,8	0.860-0.875	0.862-0.890	0.864-0.905	0.866-0.920	0.868-0.935	0.870-0.950	
4.	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persentase	-	12.2-12.276	12.2-12.352	12.2-12.428	12.2-12.504	12.202-12.580	12.202-12.656	
5.	Nilai Omset Koperasi tahun n	Rp	397.206.633.350	397.603.839.983	398.001.443.823	398.399.445.267	398.797.844.712	399.196.642.557	439.116.306.813	
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
7.	Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10%	Persentase	-	55	56	57,14	58,67	60,5	62,59	
8.	Proporsi IKM Naik Kelas	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025 – 2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada lecel Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, antara lain:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	positif	Persentase	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	positif	Persentase	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	
4.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	Persentase	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	
6.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	positif	Persentase	1,91	2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	
7.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	positif	Indeks	45	45	45	45	45	45	45	
8.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	Persentase	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daaerah Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 serta isu – isu strategis urusan koperasi, UKM dan perindustrian yang akan dihadapi dalam kurun waktur 5 (lima) tahun mendatang. Rencana ini menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 telah memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator – indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator – indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran didalamnya, meliputi kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan bersama segenap staff. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian. Apabila di kemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, dengan disusunnya Renstra ini diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 akan tercapai serta dapat

memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

POHON KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM KOTA YOGYAKARTA (Urusan Teknis)

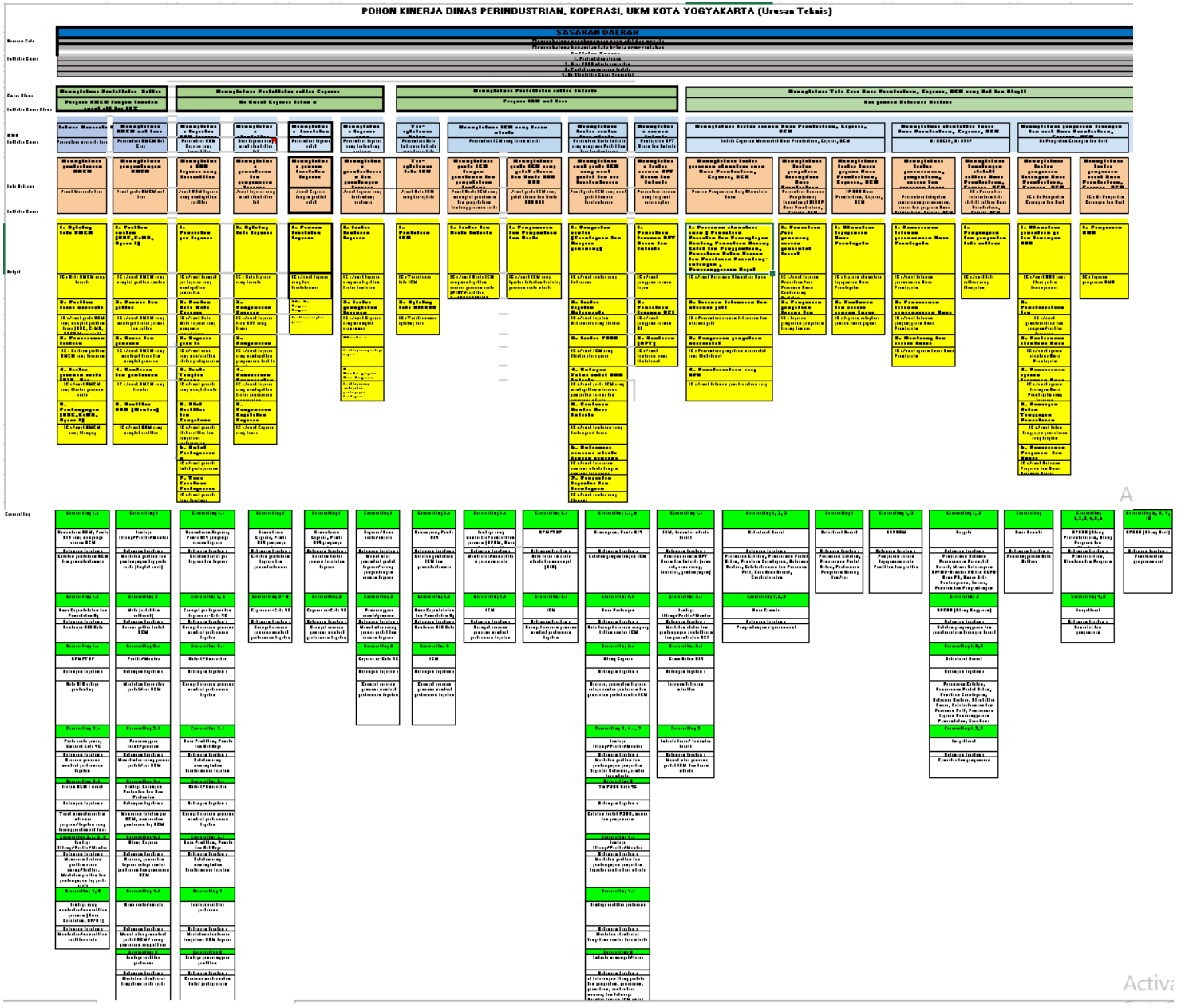

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

2025-2030

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165
Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, FAX (0274) 555241
WEBSITE : dpmptsp.jogjakota.go.id
EMAIL : dpmptsp@jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2030

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam perwujudan tata pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yang mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Rumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini juga mendasarkan evaluasi capaian sasaran target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 yang telah dikorelasikan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Yogyakarta

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iv**
DAFTAR GAMBAR **v**

BAB I PENDAHULUAN **I - 1**
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan I - 3
1.3.1. Maksud I - 3
1.3.2. Tujuan I - 3
1.4. Sistematika Penulisan I - 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **II - 1**
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II - 1
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II - 2
2.3. Sumber Daya Keuangan II - 15
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II - 15
2.4.1. Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) II - 16
2.4.2. Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) II - 18
2.4.3. Kinerja Keuangan II - 19
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II - 20
2.5.1. Kekuatan (*Strengths*) II - 20
2.5.2. Kelemahan/Kekurangan (*Weaknesses*) II - 21
2.5.3. Peluang (*Opportunities*) II - 21
2.5.4. Ancaman *(Threats*) II - 21
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis II - 22
2.6.1. Isu Strategis II - 24
2.7. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah II - 24
2.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis II - 26
2.8.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah II - 26
2.8.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) II - 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **III - 1**
3.1. Tujuan dan Sasaran III - 1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan III - 8
3.3. *Crosscutting* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu III - 10

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **IV - 1**

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV - 1
4.2. Program Prioritas IV - 90
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV - 92

BAB V PENUTUP **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Jumlah Pegawai ..... II - 2
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan ....II - 3
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ....II - 3
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ....II - 3
Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020-2024 ..... II - 16
Tabel 2.6 Perbandingan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2023-2024 ..... II - 17
Tabel 2.7 Persentase Peningkatan Investasi di Kota Yogyakarta ..... II - 18
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kota Yogyakarta..... II - 20
Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II - 22
Tabel 3.1 Penyandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD ..... III - 2
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta..... III - 3
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah ..... III - 7
Tabel 3.4 Perumusan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD ..... III - 8
Tabel 3.5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ..... III - 9
Tabel 3.6 Perumusan Program dan Sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta..... III - 10
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra..... IV - 3
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan..... IV - 29
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas..... IV - 91
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama ..... IV - 94
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci ..... IV - 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 ..... II - 1
Gambar 2.2 Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Loket *Front Office* ... II - 4
Gambar 2.3 Loket Samsat –Yogyakarta, Kantor Imigrasi, Gerai UMKM, Loket Layanan PPID dan Loket Layanan JSS ..... II - 5
Gambar 2.4 Bank BPD DIY, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja ..... II - 5
Gambar 2.5 Pojok Baca Digital, Tempat Bermain Anak dan Ruang Laktasi ..... II - 6
Gambar 2.6 Kotak Pengaduan, Fotocopy Wiwara dan Toko Wiwara ..... II - 6
Gambar 2.7 Papan Penunjuk Arah ..... II - 7
Gambar 2.8 Kursi Roda, Loket Cetak Mandiri dan Alat Cetak Mandiri ..... II - 8
Gambar 2.9 *Terminal Charger* ..... II - 8
Gambar 2.10 Monitor Antrian dan Monitor Informasi Perizinan ..... II - 9
Gambar 2.11 Ruang Tunggu *Front Office*, Ruang Tunggu Sisi Selatan dan Ruang Tunggu Sisi Utara ..... II - 10
Gambar 2.12 *Coffee Shop* Baznas, Mushola dan Ruang Inklusi ..... II - 10
Gambar 2.13 Ruang Akad Nikah ..... II - 11
Gambar 2.14 Kamar Mandi dan Kamar Mandi Difabel ..... II - 12
Gambar 2.15 Lemari Es untuk Pemohon, Tempat Parkir Motor dan Mobil ..... II - 12
Gambar 2.16 Loket Konsultasi OSS RBA dan Loket Konsultasi Teknis ..... II - 13
Gambar 2.17 Ruang Rapat Wahyu Tumurun dan Ruang Rapat Kawung ..... II - 14
Gambar 2.18 Ruang Rapat Truntum/Ruang Sidang Teknis dan Ruang Rapat Arjuna ..... II - 14
Gambar 2.19 Ruang Arsip ..... II - 15
Gambar 2.20 Alat Penilaian SKM, *Sensor Gate*, SIPADI ..... II - 16
Gambar 2.21 *Drive Thru* ..... II - 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DPMPTSP Kota Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta bertujuan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna mempermudah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan penanaman modal di Pemerintah kota Yogyakarta.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renstra DPMPTSP Kota Yogyakarta mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kinerja. DPMPTSP Kota Yogyakarta, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Walikota , proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku yang nantinya digunakan sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Yogyakarta secara berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek penanaman modal dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan DPMPTSP dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3. Sumber Daya Keuangan
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis
2.7. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
3.3. *Crosscutting* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.2. Program Prioritas
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja DPMPTSP.

DPMPTSP Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi DPMPTSP, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Umum;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I
d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II
e. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
f. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

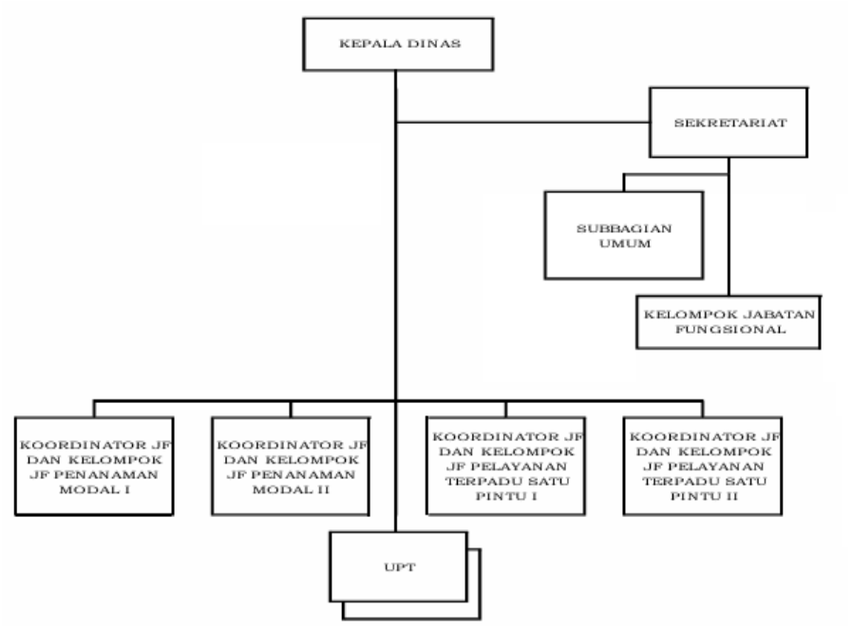

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

Adapun Tugas dan Fungsi dari DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DPMPTSP Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
g. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
j. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
n. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya DPMPTSP Kota Yogyakarta dari hasil analisis jabatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 241 tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja DPMPTSP idealnya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 106 orang pegawai, Namun untuk saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 63 orang pegawai yang terdiri dari (34 orang PNS dan 29 orang PJLOP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Jumlah Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	S.2	S.1	Diploma	SMA
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-	-
3	Koordinator Substansi	4	3	1	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-
5	Staf	27	1	18	3	5

6	PJLOP	29	-	14	8	7
	JUMLAH	63	7	33	11	12

***data per 31 Desember 2024**

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5 orang	Koordinator & Sekretaris
3.	Eselon IV	1 orang	Ka. Sub Bag
4.	Staf PNS	27 orang	
5.	PJLOP	29 orang	

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	7 orang	
2.	Golongan III	22 orang	
3.	Golongan II	3 orang	
4.	Golongan I	0 orang	
5.	Golongan IX	2 orang	
6.	PJLOP	29 orang	
	Jumlah	**63 orang**	

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	28 orang	10 PJLOP
2.	Perempuan	35 orang	19 PJLOP
	Jumlah	**63 orang**	

*** data Nominatif Pegawai per 31 Desember 2024**

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di DPMPTSP saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti:

perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Loket *Front Office*

- **Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu:**

DPMPTSP Kota Yogyakarta didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas di lantai satu berdampingan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

- **Loket *Front Office*:**

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mal Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.3 Loket Samsat –Yogyakarta, Kantor Imigrasi, Gerai UMKM, Loket Layanan PPID dan Loket Layanan JSS

- **Prasarana Layanan Pendukung Perizinan:**
  - Di Mal Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.

Gambar 2.4 Bank BPD DIY, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja

- **Bank BPD DIY, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja**

  Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja dalam dalam satu gedung di DPMPTSP Kota Yogyakarta memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Prasarana lainnya yang mendukung DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:

Gambar 2.5 Pojok Baca Digital, Tempat Bermain Anak dan Ruang Laktasi

- **Perpustakaan/Pojok Baca**

  DPMPTSP Kota Yogyakarta menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

- **Ruang Bermain Anak**

  Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar anak tidak merasa bosan.

- **Ruang Laktasi**

DPMPTSP menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya. Ruang Laktasi juga dilengkapi dengan kulkas untuk menyimpan ASI yang dimanfaatkan oleh para pegawai dari Kompleks Balaikota Pemerintah Kota Yogyakarta.

Gambar 2.6 Kotak Pengaduan, *Fotocopy* Wiwara dan Toko Wiwara

- **Kotak Pengaduan**

  Kotak Pengaduan merupakan salah satu sarana atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

- ***Fotocopy***

  Fotocopy disediakan untuk memudahkan pemohon dalam proses melengkapi data perizinan agar pemohon dapat lebih menghemat waktu dan tenaga jika ada dokumen atau berkas yang harus digandakan.

- **Toko Wiwara**

  Toko Wiwara menyediakan fasilitas mulai dari makan minum hingga kebutuhan lain yang bisa dibeli di lingkungan DPMPTSP agar pemohon nyaman dan terbantu dalam proses permohonan pelayanan perizinan.

Gambar 2.7 Papan Penunjuk Arah

- **Papan Petunjuk Arah**

  Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon untuk mengetahui letak loket dan berbagai fasilitas saat berada di Gedung DPMPTSP Kota Yogyakarta.

Gambar 2.8 Kursi Roda, Loket Cetak Mandiri dan Alat Cetak Mandiri

- **Aksesibilitas**

  Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang *disabilitas* atau lansia yang menggunakan kursi roda atau tongkat.

- **Loket Cetak Mandiri**

  Loket cetak mandiri ditujukan untuk seluruh masyarakat selaku pemohon permohonan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan dalam memproses pengajuan izin atau melengkapi dan mengedit data berkas perizinan yang masih kurang lengkap.

- **Alat Cetak Mandiri**

  Alat cetak mandiri dapat digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses dan mencetak dokumen perizinan dan dokumen kependudukan secara mandiri.

Gambar 2.9 *Terminal Charger*

- ***Terminal Charger***

Terminal charger tersedia di beberapa titik di dalam gedung DPMPTSP untuk para pemohon yang membutuhkan pengisian daya bila saat menunggu *handphone* mengalami kurang daya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon.

Gambar 2.10 Monitor Antrian dan Monitor Informasi Perizinan

- **Monitor Loket Antrian**

  Monitor yang digunakan untuk memantau antrian yang dipanggil ke meja pelayanan disediakan di beberapa titik di lantai satu DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk memudahkan pemohon mengetahui nomor antrian yang sudah atau sedang dipanggil.

- **Monitor Informasi Perizinan**

  Monitor Informasi Perizinan terletak di lantai satu Gedung DPMPTSP yang menampilkan Izin IMB yang telah terbit dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta beberapa informasi perizinan lainnya

Gambar 2.11 Ruang Tunggu *Front Office*, Ruang Tunggu Sisi Selatan dan Ruang Tunggu Sisi Utara

- **Ruang Tunggu Antrian**

  Ruang Tunggu Antrian terdapat di beberapa titik di lantai satu Mal Pelayanan Publik. Ruang Tunggu Antrian digunakan untuk memfasilitasi pemohon agar dapat duduk dengan nyaman ketika menunggu nomor antriannya dipanggil.

Gambar 2.12 *Coffee Shop* Baznas, Mushola dan Ruang Inklusi

- ***Coffee Shop* Baznas**

  Coffee Shop Baznas terletak di lantai satu gedung DPMPTSP. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pemohon, pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan tamu yang mengurus perizinan untuk menghilangkan rasa bosan, haus dan lapar. *Coffee Shop* ini dikelola oleh kaum difabel tunarungu sebagai upaya pemberdayaan dengan zakat produktif yang diharapkan mampu mengentaskan dari kekurangan yang dimiliki.

- **Mushola**

Mushola merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di DPMPTSP Kota Yogyakarta.

- **Ruang Inklusi**

  Ruang Inklusi merupakan fasilitas yang disediakan untuk mempermudah penyandang disabilitas yang menggunakan layanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta maupun mengurus perizinan dan nonperizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Gambar 2.13 Ruang Akad Nikah

- **Ruang Akad Nikah**

  DPMPTSP Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas ruang akad nikah yang ruangannya menyatu dengan ruang rapat wahyu tumurun yang bisa difungsikan selain untuk ruang rapat juga dapat menjadi tempat akad nikah yang menggunakan pintu pemisah antara ruang rapat dan ruang akad nikah. Ruang akad nikah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang menginginkan akad nikah diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik (MPP.)

Gambar 2.14 Kamar Mandi dan Kamar Mandi Difabel

- **Kamar Mandi / WC**

  DPMPTSP Kota Yogyakarta memiliki Kamar Mandi/ WC, yang berada di 2 (dua) sisi, sebelah utara sisi timur, dan sebelah selatan sisi barat. Khusus disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas di sebelah utara sisi barat.

Gambar 2.15 Lemari Es untuk Pemohon, Tempat Parkir Motor dan Mobil

- **Lemari Es**

  DPMPTSP Kota Yogyakarta juga menyediakan lemari es/kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus izin.

- **Tempat Parkir**

  Lahan parkir disediakan untuk para pemohon di sebelah barat gedung untuk lahan parkir roda empat dan sebelah timur gedung untuk parkir kendaraan roda dua.

Gambar 2.16 Loket Konsultasi OSS RBA dan Loket Konsultasi Teknis

- **Loket Konsultasi OSS RBA**

Loket Konsultasi OSS RBA merupakan Loket yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk membantu pemohon mendapatkan informasi, konsultasi dan pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS.

- **Loket Konsultasi Teknis**

  Dinas Penanaman Modal memberikan fasilitas Loket Konsultasi Teknis di Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat Kota Yogyakarta dapat berkonsultasi langsung dengan OPD Teknis terkait informasi dan konsultasi dalam mengurus izin PBG atau izin yang lain.

Gambar 2.17 Ruang Rapat Wahyu Tumurun dan Ruang Rapat Kawung

- **Ruang Rapat Wahyu Tumurun**

  DPMPTSP memiliki 4 (tiga) Ruang Rapat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi, pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ruang Rapat Wahyu Tumurun dapat digunakan untuk melakukan Koordinasi Internal maupun Koordinasi Eksternal dengan Perangkat Daerah Teknis terkait pengawasan atau pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- **Ruang Rapat Kawung**

  Ruang Rapat Kawung dapat digunakan untuk melakukan Koordinasi Internal maupun Koordinasi Eksternal dengan Perangkat Daerah Teknis terkait pengawasan atau pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ruang Rapat Kawung juga digunakan sebagai Ruang Konsultasi PBG pada hari Senin dan Selasa pada pukul 08.00-12.00.

Gambar 2.18 Ruang Rapat Truntum/Ruang Sidang Teknis
dan Ruang Rapat Arjuna

- **Ruang Rapat Truntum**

  Ruang Rapat Truntum dimanfaatkan oleh DPMPTSP dan BPKAD secara bergantian sebagai ruang rapat untuk melakukan Koordinasi Internal maupun Koordinasi Eksternal dengan Perangkat Daerah Teknis.

- **Ruang Rapat Arjuna**

  Ruang Rapat Arjuna dimanfaatkan oleh DPMPTSP dan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta secara bergantian sebagai ruang rapat untuk melakukan Koordinasi Internal maupun Koordinasi Eksternal dengan Perangkat Daerah ataupun mengundang masyarakat.

Gambar 2.19 Ruang Arsip

- **Ruang Arsip**

  DPMPTSP Memiliki Ruang Arsip Wahyu Tumurun. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan Arsip Berkas Perizinan yang masih berbentuk fisik. Terdapat sebuah inovasi Arsip Digital yang dapat digunakan untuk mempermudah pencarian arsip yang berada diantara ribuan arsip.

Gambar 2.20 Alat Penilaian SKM, *Sensor Gate*, SIPADI

- **Alat Penilaian SKM**

Penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan cara untuk tercapainya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam penyelenggaraan MPP perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik diwujudkan dengan tersedianya *Tablet* SKM MPP sebagai bentuk inovasi yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik. *Tablet* SKM MPP merupakan suatu alat penilaian kinerja pelayanan yang dilakukan melalui perangkat digital layar sentuh secara dinamis dan menarik. Penggunaan *Tablet* SKM menjadi sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 5 (lima) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang dinilai menggunakan tablet SKM yaitu kemudahan persyaratan dan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan, kemampuan dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan ruang tunggu.

Dengan adanya *Tablet* SKM MPP, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima. Selain itu, hasil rekap SKM dapat dengan mudah ditarik tanpa harus memakan waktu lama. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang diberikan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan *Tablet* SKM MPP.

- ***Sensor Gate***

  Sensor Gate ini berfungsi untuk mencegah hilangnya atau dibawanya alat SIPADI (Sistem Panggilan Digital) keluar gedung DPMPTSP. Alat SIPADI digunakan sebagai alternatif dari panggilan melalui speaker. *Sensor Gate* ini terletak di Pintu Utama sisi Barat dan sisi Timur.

- **SIPADI**

  SIPADI yaitu sistem Panggilan Digital adalah suatu sistem menggunakan alat panggilan yang terintegrasi dengan sistem SIMPPONI dimana alat panggil dibawa oleh pemohon dan apabila pemohon dipanggil maka alat tersebut akan berbunyi dan bergetar. Bunyi itu akan mati apabila pemohon sudah ke loket untuk mendapatkan layanan.

- ***Drive Thru***

  Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta menyediakan *Drive Thru* untuk layanan kependudukan, layanan SAMSAT dan layanan Polresta untuk perpanjangan SIM A dan D1

Gambar 2.21 *Drive Thru*

- **Kendaraan Dinas**

  DPMPTSP Kota Yogyakarta juga memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 6 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sejumlah 14 unit.

2.3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran dukungan dana untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Yogyakarta pada tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2025, DPMPTSP Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp 11.379.142.282,00 dengan komposisi sumber daya keuangan meliputi belanja pegawai sebesar Rp 5.290.781.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.939.419.881,00 dan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 148.941.401,00.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Renstra periode sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kota Yogyakarta selama tahun 2020-2024 memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.4.1. Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU)

Pada tahun 2020 dan 2021, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berdampak terhadap capaian kinerja DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan indikator "Nilai Investasi Meningkat", capaian realisasi investasi mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga target tidak dapat dicapai, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian dan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, pada tahun 2022 dengan indikator "Nilai Investasi Meningkat" dengan tergaet Rp 308.015.205.801,00 dapat terealisasi sebesar Rp 428.457.147.957,00 atau sebesar 139,10% dari target. Hal ini terjadi karena nilai realisasi investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dan mampu melampaui target yang telah ditentukan. Kondisi perekonomian yang mulai pulih pasca pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor utamanya. Selain itu, banyak pelaku usaha yang wajib LKPM mulai menaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang merupakan sarana administratif untuk mengukur nilai investasi sebagai hasil dari sosialisasi, pendampingan dan bimtek yang telah dilakukan oleh DPMPTSP.

Pada tahun 2023 dan 2024 muncul target batas bawah (ditentukan melalui Renstra) dan target batas atas (target yang diberikan oleh provinsi). Pada tahun 2023 dengan sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi" dengan target 318.966.195.786,00 s/d 733.200.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 862.424.406.597,00 atau sebesar 117,62% jika dibandingkan dengan target batas atas/batas maksimalnya. Sedangkan, pada tahun 2024 Pada tahun ini, dengan sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi" dengan target 323.380.884.182,00 s/d 733.200.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 867.798.987.055,82 atau sebesar 118,36% jika dibandingkan dengan target batas atas/batas maksimalnya. Target tersebut dapat tercapai karena adanya dukungan promosi investasi, penambahan personil dalam menjalankan tupoksi pendampingan, menambah kuota pembinaan dan pengawasan serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024, capaian nilai realisasi investasi mencapai Rp 867.798.987.055,82 yang merupakan capaian realisasi investasi tertinggi selama lima tahun (dari tahun 2020 s/d 2025).

Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020-2024

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
2020	Nilai Investasi meningkat	Nilai Investasi	302.272.037.097	243.232.320.000	80,46%
2021	Nilai Investasi meningkat	Nilai Investasi	288.151.242.774	248.673.816.754	86,30%

2022	Nilai Investasi meningkat	Nilai Investasi	308.015.205.801	428.457.147.957	139,10%
2023	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	318.966.195.786 s/d 733.200.000.000	862.424.406.597,00	117,62%
2024	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	323.380.884.182 s/d 733.200.000.000	867.798.987.055,82	118,36%

Selanjutnya, pada tahun 2023 target sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPMPTSP" dengan metadata hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat penilaian baru sampai Triwulan III dengan perolehan hasil evaluasi RB General DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah 95,10% atau setara dengan perolehan poin sebesar AA. Berdasarkan kesepakatan dari Bagian Organisasi bahwa nilai Reformasi Birokrasi dengan kategori >90 (diatas 90) maka akan mendapatkan poin AA dengan capaian 135,8% yang dihitung melalui capaian nilai di triwulan III dibagi dengan nilai batas atas target, dikali seratus persen ((95,10%:70)x 100%). Hasil ini masih bersifat sementara karena penilaian baru sampai Triwulan III, namun dapat dilihat hingga triwulan III, sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi" telah tercapai hingga 135,8% dengan poin AA.

Lalu pada tahun 2024, evaluasi internal mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi, sehingga penilaian Evaluasi 43 Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Tahun 2024 adalah sebesar "91,004" dengan predikat "Istimewa". Berdasarkan kesepakatan dari Bagian Organisasi bahwa nilai Reformasi Birokrasi dengan kategori >90 (diatas 90) maka akan mendapatkan poin AA dengan capaian 130% yang dihitung melalui capaian nilai di tahun 2024 dibagi dengan nilai batas atas target, dikali seratus persen ((91,004%:70)x 100%) dapat pada tahun 2024, sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi" telah tercapai hingga 130% dengan poin AA.

Tabel 2.6 Perbandingan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2023-2024

Tahun	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Realisasi**	**%**
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
2023	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B	AA	135,8%

2024	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B	AA	130%

2.4.2. Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai pengampu urusan di bidang penanaman modal memiliki 1 (satu) indikator yaitu "Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota" dengan perhitungan rumus:

$$\frac{\text{(jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota}}{\text{jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan indikator "Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota" selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Persentase Peningkatan Investasi di Kota Yogyakarta

Tahun	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**	**Realisasi**	**Realisasi tahun sebelumnya (n-1)**	**Persentase peningkatan investasi**
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
2020	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	243.232.320.000	306.219.082.711	-20,57%
2021	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	248.673.816.754	243.232.320.000	2,24%

2022	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota	428.457.147.957	248.673.816.754	72,30%
2023	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota	862.424.406.597,00	428.457.147.957	101,29%
2024	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	867.798.987.055,82	862.424.406.597,00	0,62%

Pada tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai nilai minus di tahun 2020 sebesar -20,57% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan minat investasi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi di tahun 2023 sebesar 101,29% jika dibandingkan dengan capaian investasi di tahun 2022. Capaian tersebut dapat terealisasi karena kondisi ekonomi dan iklim investasi pasca pandemi *covid-19* yang telah sepenuhnya berangsur pulih serta adanya dukungan PAD yang diwujudkan melalui promosi investasi, penambahan personil dalam menjalankan tupoksi pendampingan, menambah kuota pembinaan dan pengawasan serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta.

2.4.3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada periode Renstra sebelumnya. Tinjauan terhadap kinerja keuangan dalam rentang Renstra sebelumnya perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Anggaran yang mendukung pendanaan DPMPTSP Kota Yogyakarta berbeda-beda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang. Rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 92,39% hingga 96,36%. Serapan anggaran tahun 2022 merupakan yang paling kecil dalam periode Renstra sebelumnya, sebesar 92,39%. Hal ini antara lain disebabkan anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai

kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil, namun efisiensi tersebut belum semua terwadahi dalam anggaran perubahan sehingga penyerapan anggaran menjadi belum optimal pada akhir tahun anggaran. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran DPMPTSP Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kota Yogyakarta

Tahun	**Anggaran (Rp.)**	**Realisasi (Rp.)**	**Capaian Kinerja Keuangan (%)**
2020	5.916.526.000,00	5.622.052.163,00	95,02%
2021	10.521.347.094,00	9.953.866.386,00	94,61%
2022	13.643.039.329,00	12.604.701.704,00	92.39%
2023	12.963.306.683,00	12.491.296.285,00	96,36%
2024	12.297.162.149,00	11.712.541.098,00	95,25%

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah perlu dikaji dan dipertimbangkan guna keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah secara lebih efektif dan akuntabel. Hambatan bisa menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah dalam mengatasi dan memberi jalan keluar pemecahan atas masalah yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja Renstra sebelumnya, dengan menggunakan metode analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan/kekurangan, peluang, dan ancaman guna dicari solusi atas permasalahan yang masih ada pada capaian kinerja Renstra sebelumnya agar Renstra berikutnya menjadi lebih baik.

2.5.1. Kekuatan *(Strengths)*

a. Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
b. Dukungan dari masyarakat dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta;
c. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindak lanjutnya;
d. Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan penanaman modal;
e. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 154 Tahun 2024;
f. Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 152 Tahun 2024;
g. Adanya pengembangan dan pemeliharaan sarpras pendukung layanan penanaman modal dan mal pelayanan publik.

2.5.2. Kelemahan/Kekurangan *(Weaknesses)*

a. Pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya mundur dari tatakala semula karena ada perpanjangan masa penyelesaian pekerjaan akibat permasalahan administrasi dan finansial penyedia jasa;
b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tatakala karena menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada selesai;
c. Adanya ketentuan TKDN terhadap barang/peralatan komputer yang sebagian besar masih berstatus impor sehingga kebutuhan akan barang modal tersebut tidak dapat dipenuhi;
d. Pelaku usaha belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena ketidaktahuan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan ketidaktahuan tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
e. Pelaku usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena ketidak patuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;
f. Pengusulan pengadaan barang impor terbatas waktunya hanya pada bulan Februari dan pada tahapan penganggaran perubahan saja sehingga jika tidak mengetahui status barang sejak awal besar kemungkinan pengadaan tidak akan dapat direalisasikan.

2.5.3. Peluang *(Opportunities)*

a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta;
b. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;
c. Meningkatkan promosi investasi melalui Kerjasama UMK serta melakukan promosi investasi melalui *Podcast*, Sosialisasi, dan Pameran;
d. Melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha, Bimbingan Teknis LKPM, dan Pendampingan untuk pelaku usaha;
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal yaitu Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan inspeksi lapangan.

2.5.4. Ancaman *(Threats)*

a. Ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala perencanaan akan mengakibatkan pencapaian target tidak terpenuhi;
b. Beberapa kegiatan akan tidak terlaksana atau terlaksana tanpa dukungan anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanaman Modal	1. Pertumbuhan investasi di Kota Yogyakarta yang kurang merata karena sebagian besar tumbuh pesat di kawasan utara dan adanya Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Budaya Sumbu Filosofi Yogyakarta dimana keterbatasan ruang investasi yang diminati menjadi terkendala sehingga diperlukan pemerataan investasi di kawasan timur, selatan dan barat. 2. Sebagian besar investasi di Kota	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi.	Kondisi geopolitik global yang tidak stabil serta munculnya kebijakan proteksionis di sejumlah negara besar menghambat investasi asing (PMA) di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.	Inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian sehingga investor menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penanaman modal karena sulit memprediksi kondisi ekonomi di masa depan.	Kenaikan inflasi serta ketidakstabilan ekonomi menurunkan minat investasi dan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.	1. Melakukan penyusunan kajian terkait pengembangan potensi investasi di kawasan timur, selatan dan barat serta menyusun kajian pengembangan potensi investasi di berbagai sektor salah satunya di sektor ekonomi kreatif. 2. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di DPMPTSP Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha.

	Yogyakarta ada di sektor hotel dan restoran, disisi lain, keterbatasan ruang di Kota Yogyakarta menjadi salah satu kendala sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan investasi di sektor lain, salah satunya di sektor ekonomi kreatif. 3. Regulasi yang berubah mengikuti perkembangan zaman serta pemahaman masyarakat yang beragam dalam proses pengajuan perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha mendorong DPMPTSP dalam memberikan pelayanan optimal dalam penyelesaian permasalahan perizinan.					3. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan serta memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. 4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan mampu mendorong para investor (baik pria maupun wanita di segala usia, di segala sektor usaha) untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kota Yogyakarta.

2.6.1. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi DPMPTSP Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan kajian terkait pengembangan potensi investasi di kawasan timur, selatan dan barat serta menyusun kajian pengembangan potensi investasi di berbagai sektor salah satunya di sektor ekonomi kreatif;
2. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di DPMPTSP Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha;
3. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan serta memberikan pelayanan prima untuk masyarakat;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan mampu mendorong para investor (baik pria maupun wanita di segala usia, di segala sektor usaha) untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kota Yogyakarta.

2.7. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renstra PD perlu penyelarasan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut meliputi penyelarasan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD.

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Strategis mengemban misi yang ke 3, yakni **"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal".**

Dukungan DPMPTSP Kota Yogyakarta terhadap program strategis Kepala Daerah terpilih yaitu:

1. Meningkatkan Investor Baru di Kota Yogyakarta
2. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal
3. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan
5. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Berkaitan dengan hal diatas, berikut ini adalah faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPMPTSP Kota Yogyakarta terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

1. Faktor pendorong:
   a. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas dan koordinasi yang baik antar program kegiatan, sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
   b. Dukungan dari masyarakat dan Perangkat Daerah Pemkot Yogyakarta untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan penanaman modal, perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha;
   c. Adanya monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindak lanjutnya;
   d. Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan penanaman modal, perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha;
   e. Adanya pengembangan sarpras pendukung layanan penanaman modal, perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha.
2. Faktor penghambat:
   a. Belum terpenuhinya kebutuhan personil sesuai dengan hasil analisis jabatan baik kualitas maupun kuantitas;
   b. Perlunya penyesuaian peraturan di daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan DPMPTSP;
   c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan;
   d. Pelaku usaha khususnya skala UMK yang sudah memiliki NIB tapi belum melakukan migrasi/update data usaha;
   e. Proses pembuatan dan pengembangan aplikasi sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sehingga dalam pelaksanaannya mengikuti antrian dan kemampuan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melakukan pengembangan aplikasi.
   f.

2.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.8.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya, pendidikan, pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Tujuan dilakukannya penataan ruang yaitu untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan. Kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah meliputi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. Pemantapan dan pengembangan hirarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui strategi pengembangan pola ruang yang terdiri dari kawasan peruntukan lindung, kawasan peruntukan budi daya, dan kawasan strategis kota. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas Kawasan Lindung Setempat berupa sempadan sungai ditetapkan seluas kurang lebih 14 hektar, Ruang Terbuka Hijau Privat berupa lahan pekarangan rumah/gedung milik masyarakat/swasta dan atau institusi paling sedikit 10% luas wilayah Daerah, Ruang Terbuka Hijau Publik berupa taman di atap bangunan, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan seluas 626 hektar. Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pemukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis kota di Daerah berorientasi pada pembentukan Citra kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata

ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

RTRW Kota Yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang Kota Yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik sehingga seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan dalam konteks spasial.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024 dan bertujuan untuk melestarikan kekayaan budaya serta identitas lokal Yogyakarta. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki kaitan yang sangat erat dan signifikan dengan aspek tata ruang. Sumbu Filosofi sendiri merupakan sebuah konsep tata ruang yang fundamental bagi Yogyakarta. Sumbu Filosofi, yang membentang dari Panggung Krapyak, Keraton, hingga Tugu, adalah sebuah konsep tata ruang yang diwariskan dari abad ke-18. Pergub ini bertujuan untuk memastikan konsep tata ruang historis ini tetap terjaga sesuai dengan makna filosofisnya, terutama setelah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Pergub ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan pembangunan di sekitar Sumbu Filosofi. Ini termasuk pembatasan ketinggian bangunan, jenis bangunan, hingga penataan lingkungan untuk menghindari gangguan terhadap keindahan dan makna sumbu tersebut. Salah satu implementasi nyata dari Pergub ini adalah penertiban reklame ilegal di kawasan Sumbu Filosofi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerapian visual dan tata ruang kawasan agar tidak terganggu oleh iklan komersial. Peraturan ini memastikan bahwa kebijakan tata ruang yang lebih sektoral atau khusus, seperti yang terkait dengan Sumbu Filosofi, selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih luas di DIY.

Berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta yang telah disusun sedemikian rupa maka program dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta juga telah mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dan pemanfaatannya dalam perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan investasi di Kota Yogyakarta.

2.8.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Telaah terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan di kelompok desil 1-4 menunjukkan adanya rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, meliputi desil 1 (10% termiskin), desil 2 (miskin), desil 3 (rentan miskin), hingga desil 4 (miskin lanjut/rentan miskin lanjut). Tingkat pendapatan yang berbeda-beda ini mencerminkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketimpangan pendapatan pada desil 1-4 menunjukkan bahwa 40% penduduk termiskin nasional memiliki pendapatan yang sangat rendah dan perlu perhatian khusus dalam investasi, karena mereka umumnya tidak memiliki modal atau akses untuk berinvestasi dan menjadi penerima manfaat terbesar dari investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, sehingga investasi harus fokus pada program yang memberdayakan mereka. Oleh karena itu, investasi harus bersifat inklusif untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk desil 1-4. Investasi yang menciptakan lapangan kerja dan dapat diakses oleh penduduk di desil 1-4 akan membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam program dan kegiatannya mempertimbangkan tantangan dalam upaya meningkatnya investasi di Kota Yogyakarta di berbagai sektor di tengah kondisi perekonomian yang naik turun. Salah satu sektor ekonomi yang perlu ditumbuh kembangkan di Kota Yogyakarta salah satunya adalah investasi di sektor ekonomi kreatif yang berperan dalam pemerataan pendapatan dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mendorong kewirausahaan UMKM, memperluas akses pasar, mengatasi ketimpangan sosio-ekonomi di daerah, menjaga dan melestarikan budaya lokal, serta meningkatkan daya saing dan inovasi, yang pada akhirnya mendistribusikan nilai ekonomi secara lebih merata. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan semakin tingginya pengetahuan masyarakat menjadi pendorong bagi DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk dapat mencapai target kinerja. Pencapaian sasaran pembangunan dari aspek penanaman modal dan pelayanan publik diwujudkan melalui kegiatan penyusunan peta potensi investasi, promosi investasi, sosialisasi, pendampingan, pelatihan, konsultasi maupun layanan yang mempermudah pemenuhan kebutuhan akan informasi dan akses data bagi masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi pembangunan daerah merupakan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Visi ini harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mengakomodasi isu-isu strategis yang perlu ditangani dalam jangka menengah. Selain itu, visi harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang agar terwujud kesinambungan perencanaan yang efektif. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah **"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"** yang mencerminkan komitmen penuh untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki keseimbangan dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai budaya dan moral yang kuat.

Misi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih. Hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi:

1. Misi 1: "Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan"
2. Misi 2: "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari"
3. Misi 3: "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal"
4. Misi 4: "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945"
5. Misi 5: “Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY”

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah pada misi yang ke 3, yakni **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”**.

Tabel 3.1 Penyandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD

Visi: Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban							
Misi ke 3 dan 4 Walikota Terpilih	**Misi ke 3 Ranwal RPJMD**	**Tujuan**	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**	**Tujuan OPD**	**Sasaran OPD**
3. Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitasekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif 4. MembangunKemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensisumber daya lokal	3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan	Pengeluaran Riil Per Kapita	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ikut mendorong tercapainya **misi ke 3 yaitu "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal"** yang dicapai melalui **tujuan Perangkat Daerah yaitu "Meningkatnya Nilai Investasi" dengan indikator "Nilai Investasi pada tahun n"** sebagai upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

TABEL 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi		Laju pertumbuhan investasi (Persentase)	-	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n (Rp)	Rp867,697,842,226.82	548.482.936.425-838.000.000.000	553.967.765.790-838.000.000.000	559.507.443.448-838.000.000.000	565.102.517.882-838.000.000.000	570.753.543.061-838.000.000.000	576.461.078.492-838.000.000.000	

		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	AA (91,004)	A (81,50)	A (82,00)	A (82,50)	A (83,00)	A (83,50)	A (84,00)	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki Tujuan yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” serta Sasaran “Meningkatkan Nilai Investasi yang diukur melalui indikator “Nilai investasi tahun n”” dan tujuan yang kedua yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif” serta sasaran “Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan adalah penetapan urutan kepentingan dari berbagai program atau kegiatan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam pembangunan, berdasarkan pada kebutuhan dan urgensi, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, prioritas membantu menentukan mana yang harus dikerjakan lebih awal untuk menjawab kebutuhan mendesak dan mencapai hasil yang optimal. Dalam RPJMD 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Lokus-lokus ini mencakup Kawasan Sumbu Filosofi, Pengembangan Kawasan Yogya Selatan, dan Penataan Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai. Masing-masing kawasan ini memiliki karakteristik dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang terintegrasi, serta sinergi antara berbagai sektor.

Sebagai salah satu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka disusunlah penahapan renstra sebagai bentuk prioritas pembangunan tahunan. Pentahapan renstra Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 3.3.

Pada Tabel 3.3 dijelaskan bahwa setiap tahunnya, tahapan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terbagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu:

- Tahun pertama (Tahap I):
  Penyiapan Kebijakan dan regulasi, yaitu dengan melaksanakan penyusunan kebijakan terkait investasi, penyusunan regulasi terkait investasi dan perizinan, potensi investasi kawasan timur-selatan dan barat serta memulai penyusunan proyek investasi yang komprehensif;
- Tahun kedua (Tahap II):
  Digitalisasi dan teknologi, yaitu melalui penguatan sistem pendukung investasi, digitalisasi peta potensi investasi, inovasi yang mendukung layanan perizinan dan investasi, digitalisasi arsip, pengembangan sistem aplikasi pendukung ketersediaan informasi publik;
- Tahun ketiga (Tahap III):
  Akselerasi target pembangunan melalui penanaman modal, melalui strategi promosi investasi, pertemuan bisnis, kepeminatan investasi, pameran investasi, kolaborasi dengan pihak lain serta melakukan evaluasi sekaligus mengkaji pencapaian target pembangunan hingga pertengahan periode Renstra dengan kesesuaian arah

kebijakan pembangunan yang diambil agar tetap di jalur yang telah direncanakan sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai;

- Tahap keempat (Tahap IV):

  Pembangunan yang berkelanjutan, yaitu tahapan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dari tahun pertama hingga ketiga telah sesuai Renstra, dapat mencapai target akhir periode Renstra, pelaksanaan program kegiatan terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang luas dan merata, serta dapat dilaksanakan lagi secara berkelanjutan;

- Tahun kelima (Tahap V):

  Penyelesaian, evaluasi dan kesinambungan pembangunan yaitu tahap dimana program kegiatan tercapai sesuai target tahunannya sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah, untuk kemudian dilaksanakan evaluasi atas ketercapaian target disetiap tahunnya untuk melangkah ke periode Renstra berikutnya dalam pencapaian pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan Kebijakan dan regulasi	Digitalisasi dan teknologi	Akselerasi target pembangunan melalui penanaman modal (strategi promosi investasi, pertemuan bisnis, kepeminatan investasi, pameran investasi, kolaborasi dengan pihak lain)	Pembangunan yang berkelanjutan	Penyelesaian, evaluasi dan kesinambungan pembangunan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu **"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5

Tabel 3.4 Perumusan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD

Misi	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatkan investor baru di Kota Yogyakarta dengan melaksanakan promosi investasi yang komprehensif
		Meningkatkan iklim penanaman modal dengan memperkuat kebijakan dan regulasi
		Mengembangkan riset serta menyusun rencana komprehensif untuk penyiapan kawasan strategis ekonomi sebagai upaya peningkatan investasi
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		Meningkatkan pelayanan perizinan melalui izin terabit serta penanganan konsultasi dan pengaduan
		Meningkatkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan

Tabel 3.5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Investor Baru di Kota Yogyakarta	Meningkatkan jumlah investor baru di Kota Yogyakarta dengan melaksanakan promosi investasi yang komprehensif	
		Meningkatkan Iklim Penanaman Modal	Meningkatkan iklim penanaman modal dengan memperkuat kebijakan dan regulasi, mengembangkan riset serta menyusun rencana komprehensif untuk penyiapan kawasan strategis ekonomi sebagai upaya peningkatan investasi	
		Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal	
		Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Meningkatkan pelayanan perizinan melalui izin terbit serta penanganan konsultasi dan pengaduan	
		Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan melalui *updating* sistem, pemenuhan permohonan data dan pengelolaan arsip	

Untuk dapat melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan, maka diperlukan program dan kegiatan strategis yang mampu mendorong tercapainya sasaran Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Berikut perumusan program dan sasaran program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta:

Tabel 3.6 Perumusan Program dan Sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
PROGRAM	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR**	**OPD PENGAMPU**
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta	Jumlah investor baru tahun n	DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru tahun n	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
		Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

3.3. *Crosscutting* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan/aspek *crosscutting* sebagai berikut:

1. **Inspektorat**

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta:

a. **Pengawasan Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa:**
   Inspektorat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat dapat melakukan audit terhadap dokumen pengadaan, seperti pengecekan proses lelang, kontrak, dan pembayaran.
b. **Audit Kinerja:**
   Inspektorat dapat melakukan audit terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
c. **Pemeriksaan Keuangan:**
   Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan keakuratan, kecukupan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. **Penyuluhan dan Bimbingan:**
   Inspektorat juga dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang baik.
e. **Penanganan Pengaduan dan Pelaporan:**
   Inspektorat bertanggung jawab dalam menangani pengaduan dan pelaporan terkait dengan potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
f. **Evaluasi Kebijakan dan Prosedur:**
   Inspektorat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan bahwa DPMPTSP telah melaksanakan ketugasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan hasil yang optimal.

Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, Inspektorat berperan dalam menjaga agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam mendukung dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa peran Bappeda bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):

Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun RPJMD yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memasukkan program dan kegiatan dalam RPJMD.

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM):

Bappeda bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menyusun RPJM yang lebih rinci, mencakup program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

c. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

Bappeda akan mengkoordinasikan penyusunan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bappeda akan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan anggaran yang terkait dengan upaya peningkatan nilai investasi serta pelaksanaan perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha.

d. Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan:

Bappeda memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan pencapaian target dan efektivitas penggunaan anggaran.

e. Pembinaan dan Pemberian Bimbingan Teknis:

Bappeda dapat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui berbagai peran tersebut, Bappeda berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan fasilitator dalam memastikan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat daerah, termasuk dalam peningkatan realisasi investasi yang menjadi fokus dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pengelolaan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas. Berikut adalah beberapa peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. **Rekrutmen dan Seleksi Pegawai:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bertanggung jawab untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk pengumuman lowongan, penyusunan tes seleksi, dan pelaksanaan tes kompetensi.

b. **Pengembangan SDM:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat memberikan dukungan dalam pengembangan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pegawai, baik yang bersifat teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

c. **Evaluasi Kinerja Pegawai:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.

d. **Penyusunan Kebijakan Kepegawaian:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat berperan dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk kebijakan terkait promosi, mutasi, penghargaan, dan sanksi bagi pegawai.

e. **Manajemen Data Pegawai:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bertugas untuk mengelola data pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk pencatatan kehadiran, penggajian, dan administrasi kepegawaian lainnya, guna memastikan keakuratan dan keberlanjutan informasi.

f. **Penanganan Sengketa Ketenagakerjaan:**

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menangani sengketa ketenagakerjaan yang melibatkan pegawai di lingkungan dinas tersebut, termasuk penyelesaian konflik dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

g. **Pengawasan dan Pengendalian Kedisiplinan Pegawai:**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kedisiplinan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk penegakan peraturan dan etika kepegawaian serta penanganan pelanggaran disiplin.

Melalui berbagai peran tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membantu memastikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berikut adalah beberapa peran Dinkominfo bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. Pengembangan Sistem Informasi:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan pengelolaan informasi terkait perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha, termasuk sistem informasi penanaman modal dan potensi investasi di Kota Yogyakarta.

b. Penguatan Infrastruktur TIK:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur TIK di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk jaringan komunikasi dan koneksi internet yang handal, sehingga mendukung operasional dan konektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

c. Pengamanan dan Perlindungan Data:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan data dan informasi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk data perizinan, data non perizinan, data perizinan berusaha, data investasi, data kepegawaian, dan data lainnya yang sensitif dan bersifat rahasia.

d. Pengembangan Aplikasi dan Solusi Teknologi:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) dapat membantu dalam pengembangan aplikasi dan solusi teknologi yang inovatif untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seperti Cek Poin Jogja, Kliper Inves, sistem satu data dan sistem/aplikasi baru yang akan/sedang disusun.

Dengan memainkan peran tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinkominfosan) membantu memastikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat dalam peningkatan nilai investasi dan proses perizinan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. Penyusunan Rencana Anggaran:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membantu dalam penyusunan rencana anggaran tahunan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya keuangan yang ada.

b. Pengelolaan Anggaran:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk penyaluran dana, pemantauan penggunaan anggaran, dan pelaporan atas pengeluaran yang telah dilakukan.

c. Pembayaran dan Pelaporan Keuangan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan proses pembayaran atas berbagai kegiatan dan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta menyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi.

d. Manajemen Aset Daerah:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membantu dalam manajemen aset daerah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset secara efisien.

e. Pengawasan dan Audit Keuangan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP), guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta efektivitas penggunaan anggaran.

f. Penyusunan Kebijakan Keuangan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat memberikan masukan dan mendukung dalam penyusunan kebijakan keuangan yang berhubungan dengan aktivitas dan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

g. Pendampingan dan Bimbingan Teknis:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk penyusunan rencana anggaran, pembayaran, dan pelaporan keuangan.

h. Penyusunan Rencana Pengadaan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk perencanaan waktu, anggaran, dan spesifikasi teknis.

i. Pengumuman dan Pemilihan Penyedia:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab untuk melakukan pengumuman tender atau lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

j. Evaluasi dan Penilaian Penawaran:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran yang diterima dari para penyedia barang/jasa, termasuk penilaian atas kualitas, harga, dan kelayakan teknis dari penawaran tersebut.

k. Penyusunan Kontrak:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan kontrak antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan penyedia barang/jasa yang terpilih, termasuk pengaturan mengenai jangka waktu, pembayaran, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

l. Pengawasan Pelaksanaan Kontrak:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa, termasuk memastikan bahwa

barang/jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak.

m. Penyusunan Laporan Pengadaan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyusun laporan tentang proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan, termasuk rangkuman hasil evaluasi, keputusan pemilihan penyedia, dan informasi lain yang relevan.

n. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyedia:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia barang/jasa selama kontrak berlangsung, untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga dan memenuhi standar yang ditetapkan.

o. Pengelolaan Risiko:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, termasuk risiko terkait dengan keterlambatan pengiriman, kualitas barang/jasa yang buruk, atau masalah hukum lainnya.

Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat membantu memastikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat secara efektif.

6. Sekretariat Daerah

Bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam berbagai aspek yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Berikut adalah beberapa kegiatan Bagian pada Sekretaris Daerah yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. **Pengelolaan Sengketa Hukum:**

Bagian Hukum menangani sengketa hukum yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mengalami permasalahan terkait perizinan, baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak internal.

b. Pemantauan Peraturan Perundang-undangan:

Bagian Hukum memantau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha serta memberikan masukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan implikasi hukum dari peraturan tersebut.

c. Pengelolaan Risiko Hukum:

Bagian Hukum membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang terkait dengan peraturan/regulasi perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha, serta memberikan saran untuk mengurangi risiko tersebut.

d. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**
Bagian Hukum berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti kantor hukum, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan kepatuhan hukum dan kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha serta pelayanan public di Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

e. Penyusunan Rencana Organisasi:
Bagian Organisasi bertanggung jawab atas penyusunan rencana organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk struktur organisasi, fungsi, dan tata kerja, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

f. Pengelolaan Data Pegawai:
Bagian Organisasi mengelola data pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk data pribadi, riwayat kerja, dan kualifikasi pendidikan, untuk mendukung pengelolaan personalia dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

g. **Pengelolaan Perubahan Organisasi:**
Bagian Organisasi terlibat dalam pengelolaan perubahan organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seperti restrukturisasi, penggabungan unit kerja, atau penambahan jabatan, untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan.

h. **Pelaksanaan Evaluasi Organisasi:**
Bagian Organisasi melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk evaluasi terhadap struktur organisasi, proses kerja, dan penggunaan sumber daya, untuk mendukung perbaikan dan pengembangan organisasi.

i. Koordinasi dengan Unit Kerja Lain: Bagian Organisasi berkoordinasi dengan unit kerja lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk Bagian Kepegawaian, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi secara sinergis dan terintegrasi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasionalnya dengan baik,

serta meningkatkan kinerja dan efektivitas dinas dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.

7. OPD Teknis Terkait Izin Terbit

OPD Teknis terkait memiliki peran yang penting dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses perizinan hingga izin terbit pada masing-masing ketugasan OPD terkait sesuai kewenangannya masing-masing. Berikut adalah beberapa kegiatan OPD Teknis terkait yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. Koordinasi dengan Instansi Terkait:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, untuk mempercepat proses perizinan dan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam penerbitan izin.

b. Pemberian Rekomendasi Teknis:

OPD Teknis terkait memberikan rekomendasi teknis kepada pemohon perizinan terkait dengan aspek teknis dari izin yang diajukan, seperti persyaratan konstruksi dan perencanaan tata ruang.

c. Pengawasan Perizinan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan OPD Teknis terkait melakukan pengawasan terhadap proses perizinan dan izin terbit untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan teknis dipenuhi, dan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.

8. Bagian Hukum

Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait penyusunan regulasi penanaman modal, penyusunan regulasi perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, bantuan hukum dan membantu berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk DPRD Kota Yogyakarta, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, dan instansi pemerintah daerah lainnya, untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta gugatan dapat terselesaikan sesuai dengan asas keadilan.

9. OPD Teknis Terkait Investasi

OPD Teknis terkait investasi memiliki peran yang penting dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penyusunan peta potensi investasi, klasifikasi kawasan layak investasi di Kota Yogyakarta, penyusunan IPRO *(Investment Project Ready to Offer)* yang akan ditawarkan kepada investor, penyusunan strategi promosi hingga pelaksanaan promosi investasi.

10. Mitra Pelayanan OPD DPMPTSP terkait capaian kinerja

Mitra Pelayanan OPD DPMPTSP terkait capaian kinerja memiliki peran yang penting dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) dalam proses pemberian layanan publik baik yang diselenggarakan DPMPTSP melalui dukungan aplikasi penunjang layanan maupun yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik melalui instansi vertikal, OPD Teknis yang tergabung dalam layanan Mal Pelayanan Publik dan BUMD.

11. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait penegakan peraturan atas bangunan infrastruktur/reklame yang menyalahi izin. Berikut adalah beberapa kegiatan Satpol PP yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. **Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan:**
   Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan perizinan. Satpol PP dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap izin-izin dan regulasi yang berlaku.
b. **Penertiban Kawasan Pembangunan:**
   Satpol PP dapat melakukan penertiban terhadap kawasan pembangunan yang tidak mematuhi peraturan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, atau bangunan/infrastruktur maupun reklame yang tidak berizin sehingga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. **Penanganan Konflik dan Sengketa:**
   Satpol PP dapat terlibat dalam penanganan konflik dan sengketa yang terkait dengan penerbitan izin, baik antara pihak-pihak terkait maupun dengan masyarakat setempat, untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
d. **Penyediaan Bantuan Operasional:**
   Satpol PP dapat memberikan bantuan operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum terkait dengan penerbitan izin.
e. **Koordinasi dengan Instansi Terkait:**
   Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk Dinas PUPR, kepolisian, dan instansi pemerintah daerah lainnya, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur beserta legalitas izinnya.

12. Kemantren

Kemantren memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan izin baik perizinan, non perizinan dan perizinan berusaha. Berikut adalah beberapa kegiatan Kemantren yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

a. **Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):**

   Kemantren berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan sosialisasi langkah-langkah penerbitan izin maupun kendala dalam proses pengajuan izin yang diusulkan oleh masyarakat.

b. **Penanganan Permintaan dan Pengaduan Masyarakat**:

   Kemantren menangani permintaan dan pengaduan masyarakat terkait dengan proses penerbitan izin, izin KKPR, izin pondokan atau izin yang diusulkan masyarakat, yang kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan Analisa *Crosscutting* Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja dipengaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses pendukung dari eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hal ini menunjukkan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 s/d 2030 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merencanakan 6 (enam) Program serta 14 (empat belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 kegiatan:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah “Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi” dengan indikator “Laju pertumbuhan investasi“ yang diharapkan mampu mendorong dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta melalui investasi. Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yaitu “Nilai investasi tahun n” untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi”, dengan didukung 5 indikator program yaitu Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Sedangkan, untuk sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif“ dicapai melalui 3 (tiga) indikator yaitu Nilai SAKIP, Nilai IKM dan Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang disusun telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi				Laju pertumbuhan investasi (Persentase)		
		Meningkatnya Nilai Investasi			Nilai investasi tahun n (Rp)		
			Meningkatnya Iklim Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha baru tahun n (Usaha)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

				Meningkatnya Pemahaman Investor Terhadap Regulasi yang Mengatur Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Meningkatnya Pembuatan Peta Potensi Investasi di Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi	

						Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta		Jumlah investor baru tahun n (Investor)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Promosi Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

				Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan		Persentase pengunjung yang memanfaatkan data (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif			Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			Terpadu Satu Pintu				
					Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					eran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	

						Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program yang disusun harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan. Kerangka pendanaan yang telah disusun dengan asumsi kenaikan sebagai berikut:

Penentuan Prosentase Kenaikan Pagu Anggaran

Prosentase Kenaikan Pagu Anggaran	
2025	: mendasarkan RAPBD P 2025
2026	: mendasarkan RKPD/Renja PD 2026 (Kecuali Program Penunjang sub kegiatan Penyajian Gaji dan Tunjangan ada sedikit penyesuaian)
2027	: naik 2, 034% dibanding 2026 (kecuali program Keistimewaan)
2028	: naik 2,538% dibanding 2027 (kecuali program Keistimewaan)
2029	: naik 2,719% dibanding 2028 (kecuali program Keistimewaan)
2030	: naik 3,444% dibanding 2029 (kecuali program Keistimewaan)

Berdasarkan ketentuan prosentase kenaikan pagu anggaran tersebut, rencana program/ kegiatan dan sub kegiatan beserta rencana pendanaan setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					11.379.142.282,00		10.981.036.369,00		11.204.390.648,00		11.488.758.085,00		11.801.137.417,00		12.207.568.590,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					8.783.985.177,00		8.461.487.659,00		8.633.594.318,00		8.852.714.942,00		9.093.420.261,00		9.406.597.655,00		

KABUPATEN/ KOTA																	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	4.582	4.582-4.587	8.783.985.177,00	4.587-4.592	8.461.487.659,00	4.592-4.597	8.633.594.318,00	4.597-4.602	8.852.714.942,00	4.602-4.607	9.093.420.261,00	4.607-4.612	9.406.597.655,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	-	80		80.5		81		81.5		82		82.5			

	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	A	A		A		A		A		A		A			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					58.165.104,00		53.869.104,00		54.964.802,00		56.359.808,00		57.892.231,00		59.886.040,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persen Persen	2	2	58.165.104,00	2	53.869.104,00	2	54.964.802,00	2	56.359.808,00	2	57.892.231,00	2	59.886.040,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1	1		1		1		1		1		1			

	Perangkat Daerah																
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		2	2		2		2		2		2		2			

	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		2	2		2		2		2		2		2			

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.498.104,00		3.083.104,00		3.145.815,00		3.225.655,00		3.313.361,00		3.427.473,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	4.498.104,00	1	3.083.104,00	1	3.145.815,00	1	3.225.655,00	1	3.313.361,00	1	3.427.473,00		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.110.000,00		2.175.000,00		2.219.240,00		2.275.564,00		2.337.436,00		2.417.937,00		

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	3.110.000,00	2	2.175.000,00	2	2.219.240,00	2	2.275.564,00	2	2.337.436,00	2	2.417.937,00		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.110.000,00		2.280.000,00		2.326.375,00		2.385.419,00		2.450.278,00		2.534.666,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	2	2	3.110.000,00	2	2.280.000,00	2	2.326.375,00	2	2.385.419,00	2	2.450.278,00	2	2.534.666,00		

Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD																
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					37.767.000,00		38.901.000,00		39.692.246,00		40.699.635,00		41.806.258,00		43.246.066,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	37.767.000,00	2	38.901.000,00	2	39.692.246,00	2	40.699.635,00	2	41.806.258,00	2	43.246.066,00		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.180.000,00		2.280.000,00		2.326.375,00		2.385.419,00		2.450.278,00		2.534.666,00		

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	3.180.000,00	2	2.280.000,00	2	2.326.375,00	2	2.385.419,00	2	2.450.278,00	2	2.534.666,00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.090.000,00		2.765.000,00		2.821.240,00		2.892.843,00		2.971.500,00		3.073.838,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	2	2	3.090.000,00	2	2.765.000,00	2	2.821.240,00	2	2.892.843,00	2	2.971.500,00	2	3.073.838,00		

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.410.000,00		2.385.000,00		2.433.511,00		2.495.273,00		2.563.120,00		2.651.394,00		
Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap oran	1	1	3.410.000,00	1	2.385.000,00	1	2.433.511,00	1	2.495.273,00	1	2.563.120,00	1	2.651.394,00		

2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.303.446.000,00		4.793.828.857,00		4.891.335.345,00		5.015.477.435,00		5.151.848.268,00		5.329.277.922,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai	4	1	5.303.446.000,00	1	4.793.828.857,00	1	4.891.335.345,00	1	5.015.477.435,00	1	5.151.848.268,00	1	5.329.277.922,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		12	12		12		12		12		12		12			

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	33		33		33		33		33		33			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	12		12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		36	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12	1		1		1		1		1		1			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.290.781.000,00		4.787.668.857,00		4.885.050.050,00		5.009.032.621,00		5.145.228.219,00		5.322.429.879,00		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	37	33	5.290.781.000,00	33	4.787.668.857,00	33	4.885.050.050,00	33	5.009.032.621,00	33	5.145.228.219,00	33	5.322.429.879,00		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2.057.000,00		1.161.000,00		1.184.615,00		1.214.680,00		1.247.707,00		1.290.678,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	12	2.057.000,00	12	1.161.000,00	12	1.184.615,00	12	1.214.680,00	12	1.247.707,00	12	1.290.678,00		

2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.057.000,00		1.161.000,00		1.184.615,00		1.214.680,00		1.247.707,00		1.290.678,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	2.057.000,00	12	1.161.000,00	12	1.184.615,00	12	1.214.680,00	12	1.247.707,00	12	1.290.678,00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.657.000,00		611.000,00		623.428,00		639.250,00		656.632,00		679.246,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	4	1	2.657.000,00	1	611.000,00	1	623.428,00	1	639.250,00	1	656.632,00	1	679.246,00		

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.507.000,00		611.000,00		623.428,00		639.250,00		656.632,00		679.246,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	1	1.507.000,00	1	611.000,00	1	623.428,00	1	639.250,00	1	656.632,00	1	679.246,00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan					2.330.000,00		1.730.000,00		1.765.188,00		1.809.989,00		1.859.202,00		1.923.233,00		

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	2.330.000,00	12	1.730.000,00	12	1.765.188,00	12	1.809.989,00	12	1.859.202,00	12	1.923.233,00		
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis					2.057.000,00		886.000,00		904.021,00		926.965,00		952.169,00		984.962,00		

Realisasi Anggaran																	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	1	2.057.000,00	1	886.000,00	1	904.021,00	1	926.965,00	1	952.169,00	1	984.962,00		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.193.250,00		13.564.250,00		13.840.143,00		14.191.407,00		14.577.271,00		15.079.313,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai	3	3	17.193.250,00	3	13.564.250,00	3	13.840.143,00	3	14.191.407,00	3	14.577.271,00	3	15.079.313,00		

	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2	2		2		2		2		2		2		

	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12	12		12		12		12		12		12			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					3.127.050,00		2.433.050,00		2.482.538,00		2.545.545,00		2.614.758,00		2.704.810,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	3.127.050,00	3	2.433.050,00	3	2.482.538,00	3	2.545.545,00	3	2.614.758,00	3	2.704.810,00		

2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					3.929.300,00		2.999.300,00		3.060.305,00		3.137.976,00		3.223.297,00		3.334.308,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	12	3.929.300,00	12	2.999.300,00	12	3.060.305,00	12	3.137.976,00	12	3.223.297,00	12	3.334.308,00		
2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2.496.600,00		2.196.600,00		2.241.278,00		2.298.162,00		2.360.649,00		2.441.950,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	Laporan	2	2	2.496.600,00	2	2.196.600,00	2	2.241.278,00	2	2.298.162,00	2	2.360.649,00	2	2.441.950,00		

	Daerah SKPD																
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.679.300,00		2.264.300,00		2.310.355,00		2.368.992,00		2.433.405,00		2.517.212,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	2.679.300,00	12	2.264.300,00	12	2.310.355,00	12	2.368.992,00	12	2.433.405,00	12	2.517.212,00		

2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.475.250,00		1.830.250,00		1.867.477,00		1.914.873,00		1.966.939,00		2.034.680,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2.475.250,00	2	1.830.250,00	2	1.867.477,00	2	1.914.873,00	2	1.966.939,00	2	2.034.680,00		
2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					2.485.750,00		1.840.750,00		1.878.190,00		1.925.859,00		1.978.223,00		2.046.353,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2.485.750,00	2	1.840.750,00	2	1.878.190,00	2	1.925.859,00	2	1.978.223,00	2	2.046.353,00		

2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					22.844.000,00		19.560.000,00		19.957.850,00		20.464.380,00		21.020.807,00		21.744.763,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai	12	12	22.844.000,00	12	19.560.000,00	12	19.957.850,00	12	20.464.380,00	12	21.020.807,00	12	21.744.763,00		
2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					22.844.000,00		19.560.000,00		19.957.850,00		20.464.380,00		21.020.807,00		21.744.763,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	22.844.000,00	12	19.560.000,00	12	19.957.850,00	12	20.464.380,00	12	21.020.807,00	12	21.744.763,00		

2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					797.785.806,00		730.089.330,00		744.939.345,00		763.845.906,00		784.614.875,00		811.637.012,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai	24	19	797.785.806,00	18	730.089.330,00	24	744.939.345,00	24	763.845.906,00	24	784.614.875,00	24	811.637.012,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	10		10		10		10		10					

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		17	17		17		17		17		17		17			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		21	19		20		21		21		21		21			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		104	107		107		107		107		107		107			

2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					51.609.900,00		49.812.100,00		50.825.278,00		52.115.223,00		53.532.236,00		55.375.886,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	21	19	51.609.900,00	20	49.812.100,00	21	50.825.278,00	21	52.115.223,00	21	53.532.236,00	21	55.375.886,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					445.377.800,00		432.178.930,00		440.969.449,00		452.161.254,00		464.455.518,00		480.451.366,00		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	104	107	445.377.800,00	107	432.178.930,00	107	440.969.449,00	107	452.161.254,00	107	464.455.518,00	107	480.451.366,00		
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					31.874.800,00		65.144.800,00		66.469.845,00		68.156.850,00		70.010.034,00		72.421.180,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	19	31.874.800,00	18	65.144.800,00	24	66.469.845,00	24	68.156.850,00	24	70.010.034,00	24	72.421.180,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					70.076.200,00		69.836.500,00		71.256.974,00		73.065.476,00		75.052.126,00		77.636.922,00		

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17	70.076.200,00	17	69.836.500,00	17	71.256.974,00	17	73.065.476,00	17	75.052.126,00	17	77.636.922,00		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.240.106,00		3.240.000,00		3.305.901,00		3.389.805,00		3.481.974,00		3.601.893,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	3.240.106,00	1	3.240.000,00	1	3.305.901,00	1	3.389.805,00	1	3.481.974,00	1	3.601.893,00		

2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					192.607.000,00		109.877.000,00		112.111.898,00		114.957.298,00		118.082.987,00		122.149.765,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	192.607.000,00	10	109.877.000,00	10	112.111.898,00	10	114.957.298,00	10	118.082.987,00		122.149.765,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					148.521.401,00		317.032.702,00		323.481.146,00		331.691.098,00		340.709.779,00		352.443.824,00		

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai	40	3	148.521.401,00	26	317.032.702,00	26	323.481.146,00	26	331.691.098,00	26	340.709.779,00	26	352.443.824,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		48	11		33		33		33		33		33			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					10.670.000,00		100.327.500,00		102.368.161,00		104.966.265,00		107.820.298,00		111.533.629,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	3	10.670.000,00	26	100.327.500,00	26	102.368.161,00	26	104.966.265,00	26	107.820.298,00	26	111.533.629,00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan					137.851.401,00		216.705.202,00		221.112.985,00		226.724.833,00		232.889.481,00		240.910.195,00		

Mesin Lainnya																	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	48	11	137.851.401,00	33	216.705.202,00	33	221.112.985,00	33	226.724.833,00	33	232.889.481,00	33	240.910.195,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.290.880.416,00		1.373.029.622,00		1.400.957.044,00		1.436.513.333,00		1.475.572.131,00		1.526.390.834,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen	12	12	1.290.880.416,00	12	1.373.029.622,00	12	1.400.957.044,00	12	1.436.513.333,00	12	1.475.572.131,00	12	1.526.390.834,00		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	2		2		2		2				2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12		12		12		12		12		12			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000.000,00		6.000.000,00		6.122.040,00		6.277.417,00		6.448.100,00		6.670.172,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.122.040,00	2	6.277.417,00		6.448.100,00	2	6.670.172,00		

2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					16.500.000,00		16.500.000,00		16.835.610,00		17.262.897,00		17.732.276,00		18.342.975,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	16.500.000,00	12	16.500.000,00	12	16.835.610,00	12	17.262.897,00	12	17.732.276,00	12	18.342.975,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.268.380.416,00		1.350.529.622,00		1.377.999.394,00		1.412.973.019,00		1.451.391.755,00		1.501.377.687,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.268.380.416,00	12	1.350.529.622,00	12	1.377.999.394,00	12	1.412.973.019,00	12	1.451.391.755,00	12	1.501.377.687,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.148.149.200,00		1.160.513.794,00		1.184.118.643,00		1.214.171.575,00		1.247.184.899,00		1.290.137.947,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai	163	208	1.148.149.200,00	182	1.160.513.794,00	182	1.184.118.643,00	182	1.214.171.575,00	182	1.247.184.899,00	182	1.290.137.947,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6	5		7		7		7		7		7			

	yang Dipelihara/ Direhabilitasi																
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19	19		19		19		19		19					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		1	1		1		1		1		1		1			

	Pajak dan Perizinannya																
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					212.190.000,00		212.190.000,00		216.505.944,00		222.000.865,00		228.037.069,00		235.890.665,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	19	19	212.190.000,00	19	212.190.000,00	19	216.505.944,00	19	222.000.865,00	19	228.037.069,00		235.890.665,00		

Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya																
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8.500.000,00		8.500.000,00		8.672.890,00		8.893.008,00		9.134.808,00		9.449.411,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	1	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.672.890,00	1	8.893.008,00	1	9.134.808,00	1	9.449.411,00		

atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					209.459.200,00		219.512.800,00		223.977.690,00		229.662.244,00		235.906.760,00		244.031.389,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	163	208	209.459.200,00	182	219.512.800,00	182	223.977.690,00	182	229.662.244,00	182	235.906.760,00	182	244.031.389,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					718.000.000,00		720.310.994,00		734.962.119,00		753.615.458,00		774.106.262,00		800.766.482,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	5	718.000.000,00	7	720.310.994,00	7	734.962.119,00	7	753.615.458,00	7	774.106.262,00	7	800.766.482,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.224.901.955,00		369.159.250,00		376.667.949,00		386.227.782,00		396.729.315,00		410.392.673,00		
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru tahun n	Usaha Baru	-	13.834	1.224.901.955,00	14346	369.159.250,00	14877	376.667.949,00	15427	386.227.782,00	15998	396.729.315,00	16590	410.392.673,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

																Satu Pintu	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					458.315.000,00		263.944.750,00		269.313.386,00		276.148.560,00		283.657.039,00		293.426.188,00		
Meningkatnya Pemahaman Investor Terhadap Regulasi yang Mengatur Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Investor		4	458.315.000,00	1	263.944.750,00	1	269.313.386,00	1	276.148.560,00	1	283.657.039,00	1	293.426.188,00		

2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					458.315.000,00		263.944.750,00		269.313.386,00		276.148.560,00		283.657.039,00		293.426.188,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		4	458.315.000,00	1	263.944.750,00	1	269.313.386,00	1	276.148.560,00	1	283.657.039,00	1	293.426.188,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					766.586.955,00		105.214.500,00		107.354.563,00		110.079.222,00		113.072.276,00		116.966.485,00		

Meningkatnya Pembuatan Peta Potensi Investasi di Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Peta Potensi	5	2	766.586.955,00	1	105.214.500,00	1	107.354.563,00	1	110.079.222,00	1	113.072.276,00	1	116.966.485,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					766.586.955,00		105.214.500,00		107.354.563,00		110.079.222,00		113.072.276,00		116.966.485,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	2	766.586.955,00	1	105.214.500,00	1	107.354.563,00	1	110.079.222,00	1	113.072.276,00	1	116.966.485,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0		764.302.810,00		779.848.729,00		799.641.290,00		821.383.537,00		849.671.986,00		

Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta	Jumlah investor baru tahun n	Investor Baru	11350	6898	0	7174	764.302.810,00	7439	779.848.729,00	7715	799.641.290,00	8000	821.383.537,00	8296	849.671.986,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		764.302.810,00		779.848.729,00		799.641.290,00		821.383.537,00		849.671.986,00		
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Investor Potensial	-	5	0	5	764.302.810,00	5	779.848.729,00	5	799.641.290,00	5	821.383.537,00	5	849.671.986,00		

	Kabupaten/ Kota																
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		764.302.810,00		779.848.729,00		799.641.290,00		821.383.537,00		849.671.986,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	5	0	5	764.302.810,00	5	779.848.729,00	5	799.641.290,00	5	821.383.537,00	5	849.671.986,00		

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					703.688.000,00		725.519.000,00		740.276.056,00		759.064.263,00		779.703.220,00		806.556.199,00		
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	81.95	81.95	703.688.000,00	81.96	725.519.000,00	81.97	740.276.056,00	81.98	759.064.263,00	81.99	779.703.220,00	82	806.556.199,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi					703.688.000,00		725.519.000,00		740.276.056,00		759.064.263,00		779.703.220,00		806.556.199,00		

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Persen	300	250	574.128.000,00	200	590.050.000,00	200	602.051.616,54	200	617.331.687,27	200	634.116.935,53	200	655.955.922,89		

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1000	750		700		700		700		700		700			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi					493.804.000,00		497.366.000,00		507.482.424,44		520.362.328,37		534.510.980,08		552.919.538,24		

secara Elektronik																	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1000	750	493.804.000,00	700	497.366.000,00	700	507.482.424,44	700	520.362.328,37	700	534.510.980,08	700	552.919.538,24		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan					80.324.000,00		92.684.000,00		94.569.192,10		96.969.358,90		99.605.955,45		103.036.384,65		

berusaha berbasis risiko																	
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	300	250	80.324.000,00	200	92.684.000,00	200	94.569.192,10	200	96.969.358,90	200	99.605.955,45	200	103.036.384,65		

Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persen	3000	2000	129.560.000,00	1800	135.469.000,00	1800	138.224.439,46	1800	141.732.575,73	1800	145.586.284,47	1800	150.600.276,11		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					129.560.000,00		135.469.000,00		138.224.439,46		141.732.575,73		145.586.284,47		150.600.276,11		

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3000	2000	129.560.000,00	1800	135.469.000,00	1800	138.224.439,46	1800	141.732.575,73	1800	145.586.284,47	1800	150.600.276,11		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					374.058.300,00		387.528.800,00		395.411.136,00		405.446.671,00		416.470.766,00		430.814.019,00		

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	-	61.78	374.058.300,00	63.04	387.528.800,00	64.11	395.411.136,00	65.02	405.446.671,00	65.81	416.470.766,00	66.51	430.814.019,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					374.058.300,00		387.528.800,00		395.411.136,00		405.446.671,00		416.470.766,00		430.814.019,00		

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persen	15	15	374.058.300,00	15	387.528.800,00	15	395.411.136,00	15	405.446.671,00	15	416.470.766,00	15	430.814.019,00		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi		40	40		30		30		30		30		30			

	Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha																
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		200	200		200		200		200		200		200			

2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					29.740.800,00		25.462.800,00		25.980.713,00		26.640.104,00		27.364.449,00		28.306.880,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	15	15	29.740.800,00	15	25.462.800,00	15	25.980.713,00	15	26.640.104,00	15	27.364.449,00	15	28.306.880,00		

2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					175.686.500,00		195.258.000,00		199.229.548,00		204.285.994,00		209.840.530,00		217.067.438,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200	200	175.686.500,00	200	195.258.000,00	200	199.229.548,00	200	204.285.994,00	200	209.840.530,00	200	217.067.438,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal					168.631.000,00		166.808.000,00		170.200.875,00		174.520.573,00		179.265.787,00		185.439.701,00		

Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	40	40	168.631.000,00	30	166.808.000,00	30	170.200.875,00	30	174.520.573,00	30	179.265.787,00	30	185.439.701,00		

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					292.508.850,00		273.038.850,00		278.592.460,00		285.663.137,00		293.430.318,00		303.536.058,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	Persen	-	80	292.508.850,00	81	273.038.850,00	82	278.592.460,00	83	285.663.137,00	84	293.430.318,00	85	303.536.058,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah					292.508.850,00		273.038.850,00		278.592.460,00		285.663.137,00		293.430.318,00		303.536.058,00		

Kabupaten/Kota																	
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Modul	1	2	292.508.850,00	2	273.038.850,00	2	278.592.460,00	2	285.663.137,00	2	293.430.318,00	2	303.536.058,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan					292.508.850,00		273.038.850,00		278.592.460,00		285.663.137,00		293.430.318,00		303.536.058,00		

Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	2	292.508.850,00	2	273.038.850,00	2	278.592.460,00	2	285.663.137,00	2	293.430.318,00	2	303.536.058,00		

4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga;
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga;
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga.

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pemetaan dan penyelarasan program prioritas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak termasuk dalam Perangkat Daerah pengampu program prioritas yang dapat disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

3.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penanaman Modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKD mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas yang diklasifikasikan ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Baik IKU maupun IKD berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintahan modern. Sebagai alat ukur kinerja yang komprehensif, IKK memainkan peran krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah. Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK,

adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Implementasi IKK yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pimpinan hingga staf pelaksana. Diperlukan juga sistem pendukung yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengolahan dan analisis data.

Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui Tabel 4.4 dan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.	Laju pertumbuhan investasi	Persentase	-	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
3.	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	AA (91,004)	A (81,50)	A (82,00)	A (82,50)	A (83,00)	A (83,50)	A (84,00)	
4.	Nilai investasi tahun n	Rp	867.697.842.226,82	548482936425-838000000000	553967765790-838000000000	559507443448-838000000000	565102517882-838000000000	570753543061-838000000000	576461078492-838000000000	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	positif	Persentase	-	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 serta isu-isu bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Untuk selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

POHON KINERJA TAHUN 2025-2029
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Meningkatnya Nilai Investasi

IK: Nilai Investasi tahun n

Meningkatnya Iklim Penanaman Modal

IK: Jumlah kegiatan usaha baru

Meningkatnya Kepuasan Usaha Terhadap Regulasi Penanaman Modal

IK: Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan investor pada tahun n

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

IK: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

IK: Persentase pengunjung yang memanfaatkan data

Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta

IK: Jumlah investor baru tahun n

Meningkatnya Promosi Penanaman Modal yang Berdaya Saing

IK: Jumlah calon investor potensial

Terlaksananya pengembangan promosi penanaman modal

IK 1: Jumlah proposal investasi yang ditawarkan

IK 2: Jumlah media promosi penanaman modal

CASCADING

OPD Teknis Terkait Investasi

Pemberian rekomendasi teknis dalam proses pengurusan PMDS (Investment Project Ready to Offer) yang akan ditawarkan kepada investor

IK: Jumlah proposal investasi yang ditawarkan

Meningkatnya Pendaftaran Perizinan Investasi di Kota Yogyakarta

IK: Jumlah pendaftaran pelayanan/proses investasi

Terlaksananya pelayanan/proses penanaman modal

IK: Jumlah pelaku pelayanan/proses penanaman modal Kota Yogyakarta yang terlayani

CASCADING

OPD Teknis Terkait Investasi

Pemberian rekomendasi teknis pada proses pengurusan perizinan/investasi dan klasifikasi kewajiban bagi investasi di Kota Yogyakarta

IK: Jumlah pelaku pelayanan penanaman modal Kota Yogyakarta yang terlayani

Meningkatnya Pendampingan Investor Terhadap Regulasi yang Berkaitan dengan Penanaman Modal dan Perizinan

IK: Jumlah investor yang mendapatkan asistensi/advokasi regulasi penanaman modal dan perizinan

Terwujudnya regulasi daerah yang mendukung penanaman modal dan perizinan

IK: Jumlah regulasi daerah penanaman modal dan perizinan yang terwujud

CASCADING

Bagian Hukum

Pemberian pendampingan dalam penyusunan regulasi, bantuan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan regulasi yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diterapkan sekaligus sesuai dengan visi misi Walikota

IK: Jumlah regulasi daerah penanaman modal dan perizinan yang terwujud

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

IK: Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan dawasi

Terselenggaranya pemantauan pemanfaatan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mendukung kegiatan usahanya dalam tahun n

IK: Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mendukung kegiatan usahadalam tahun n

Terlaksananya diseminasi informasi penanaman modal terhadap pelaku usaha

IK: Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan diseminasi informasi penanaman modal

Terlaksananya pengawasan dan evaluasi penanaman modal

IK: Jumlah kegiatan usaha yang dawas dan dievaluasi dalam pelaksanaan penanaman modal

CASCADING

OPD Teknis

(Sesuai Keputusan Walikota No. 314 tahun 2023 tentang Penetapan Sektor dan Kegiatan Usaha Walikota No. 128 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan Walikota)

Melaksanakan pengendalian penanaman modal melalui pengawasan terpadu

IK: Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu

KaPOPP

Terlaksananya pemberian sanksi terkait kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha

IK: Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan sanksi terkait kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

IK: Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku

Terselenggaranya fungsi teknis pelayanan perizinan, dan nonperizinan

IK: Jumlah pemohon yang mengikuti/lulus teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan

Terlaksananya verifikasi perizinan, nonperizinan, perizinan berusahasesuai perizinan yang berlaku

IK: Jumlah izin terverifikasi

CASCADING

OPD Teknis

Pemberian rekomendasi dari OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan yang ditawarkan

IK: Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang ditawarkan rekomendasi teknis oleh OPD teknis

Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)

IK: Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku

Terselenggaranya Layanan KIP

IK: Jumlah KIP yang ditindaklanjuti

CASCADING

OPD Teknis

Pemberian jawaban dan konfirmasi teknis terkait konsultasi, informasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan yang masuk

IK: Jumlah KIP terkait OPD Teknis yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

IK: Jumlah sistem informasi yang dikembangkan pada tahun n

Terwujudnya sistem informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan

IK: Jumlah sistem informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terfasilitasi

Terfasilitasinya pengelolaan arsip penanaman modal dan perizinan

IK: Jumlah data dan arsip yang terfasilitasi pada tahun n

CASCADING

Diskominfosan

Koordinasi dan pembuatan sistem perizinan dan pemrosesan dan rekomendasi dari DPMPTSP

IK: Jumlah sistem informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terfasilitasi

Meningkatnya Nilai Hasil Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Baik dan Akuntabel

IK: Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IK:
1. Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Nilai PPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Nilai RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang DPMPTSP

IK:
1. Persentase kebijakan yang perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPMPTSP
2. Persentase kebijakan yang data statistik sektoral DPMPTSP

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

IK: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

IK: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

IK: Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

IK: Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK: Jumlah laporan Evaluasi Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan DPMPTSP

IK:
Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset DPMPTSP (Ganda)

Terwujudnya Dok dan Tertibnya Adm

IK: Jumlah uraian yang investmyd yg gk dan Tertibnya Adm

Terlaksananya Pembahasan Pendahuluan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

IK: Jumlah Dokumen Pendahuluan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Terwujudnya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

IK: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Terwujudnya Dokumen Rekon Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

IK: Jumlah Dokumen Rekon Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terwujudnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

IK: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset DPMPTSP

IK:
Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset DPMPTSP

Terwujudnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

IK: Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tertuang

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

IK: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Terwujudnya Laporan Hasil Pendataan Barang Milik Daerah SKPD

IK: Jumlah laporan hasil Pendataan Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi pendataan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD

IK: Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IK: Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

IK: Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Mebel

IK: Jumlah Unit mebel yang disediakan

Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya

IK: Jumlah Unit peralatan mesin lainnya yang disediakan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan

IK: Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak-pajaknya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

IK: Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya

IK: Jumlah bangunan Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ disehatkan.

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPMPTSP

IK:
Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPMPTSP

Terwujudnya Kompetensi Jabatan Untuk/Perencanaan Kebutuhan Kantor

IK: Jumlah Jenis kompetensi Jabatan Untuk / perencanaan kebutuhan kantor yang disediakan

Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

IK: Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Terwujudnya Pengelolaan Rumah Tangga

IK: Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

IK: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Terlaksananya Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IK: Jumlah layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

IK:
Persentase Barang dan Pengadaan yang Diumumkan pada LPSE DPMPTSP

Terlaksananya pengadaan Jasa Surat Menyurat

IK: Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Surat Menyurat

Terwujudnya Jasa Kebersihan, Sumber Daya Air dan Listrik

IK: Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Lainnya

IK: Jumlah Layanan pemeliharaan pekarangan umum kantor yang disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

IK: Jumlah layanan pelayanan umum kantor yang disediakan

Consulting Setuasaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Inspektorat	Dukungan Koordinasi, Pendampingan dan Pembinaan Administrasi Setkot/ SPIP, LKIP
2	Bagian Organisasi	Dukungan Koordinasi, Pendampingan LKIP, RB, Budaya Pemerintahan dan Perjanjian
3	Bagian Tata Pemerintahan	Dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi terkait penilaian IKK
4	Bagian Pengadaan Barang dan	Dukungan pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan paket pengadaan dan
5	Bagian Administrasi	Dukungan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di kepala
6	Bagian Hukum	Dukungan Produk Hukum
7	Bappeda	Dukungan dalam perencanaan pembangunan
8	BPKAD	Dukungan pengelolaan keuangan dan aset daerah
9	Dinas Perpustakaan dan	Dukungan dalam pendampingan pengelolaan arsip
10	Dinas Kominfo	Dukungan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Data statistik sektoral

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor Baru di Kota Yogyakarta	Jumlah investor baru tahun n	Jumlah investor baru yang bersumber dari OSS	Penanaman Modal I
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru	Jumlah kegiatan usaha baru di tahun n	Penanaman Modal I
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru	Jumlah kegiatan usaha baru di tahun n	Penanaman Modal I
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	(Jumlah pelaku usaha skala Menengah dan Besar yang melaporkan LKPM/Jumlah pelaku usaha skala menengah dan besar yang wajib melaporkan LKPM)X 100	Penanaman Modal II
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	(Jumlah pelaku usaha skala Menengah dan Besar yang melaporkan LKPM/Jumlah pelaku usaha skala menengah dan besar yang wajib melaporkan LKPM)X 100	Penanaman Modal II

6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	(Jumlah pelaku usaha skala Menengah dan Besar yang melaporkan LKPM/Jumlah pelaku usaha skala menengah dan besar yang wajib melaporkan LKPM)X 100	Penanaman Modal II
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Perizinan dan Non Perizinan pada tahun n	Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Perizinan dan Non Perizinan pada tahun n	Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Perizinan dan Non Perizinan pada tahun n	Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	Nilai investasi pada LKPM pada tahun n	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	(Jumlah pengunjung yang memanfaatkan data dengan mengunduh data pada website aplikasi/Jumlah pengunjung website aplikasi data) x 100%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan investasi	(Investasi Tahun Berjalan - Investasi Tahun Sebelumnya) dibagi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Jumlah calon investor potensial	Jumlah calon investor potensial yang didapatkan melalui promosi investasi yang terukur (pameran investasi, temu investor, bussines matching dan melalui kinik perizinan dan investasi)	Penanaman Modal I	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1. Jumlah proposal investasi yang disusun 2. Jumlah media promosi penanaman modal	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Investor Terhadap Regulasi yang Mengatur Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah investor yang mendapatkan sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan	Jumlah investor yang mendapatkan sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan di tahun n	Penanaman Modal I	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya regulasi daerah yang mendukung penanaman modal dan perizinan	Jumlah regulasi daerah penanaman modal dan perizinan yang tersusun	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembuatan Peta Potensi Investasi di Kota Yogyakarta	Jumlah pembuatan peta potensi investasi	Jumlah pembuatan peta potensi investasi	Penanaman Modal I	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya peta potensi penanaman modal	Jumlah peta potensi penanaman modal Kota Yogyakarta yang tersusun	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	(Jumlah pelaku usaha yang dipantau/ dibina/diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pemantauan/pembinaan/pengawasan) X 100	Penanaman Modal II	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terselenggaranya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam tahun n	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha dalam tahun n	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	(Jumlah pelaku usaha yang dipantau/ dibina/diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pemantauan/pembinaan/pengawasan) X 100	Penanaman Modal II	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis penanaman modal	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	(Jumlah pelaku usaha yang dipantau/ dibina/diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pemantauan/pembinaan/pengawasan) X 100	Penanaman Modal II	Pengawasan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dievaluasi dalam pelaksanaan penanaman modal	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2. Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)	1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	Pelayanan Terpadu Satu Pintu I	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terselenggaranya forum teknis pelayanan perizinan, dan nonperizinan	Jumlah pemohon yang mengikuti forum teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan	Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2. Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)	1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	Pelayanan Terpadu Satu Pintu I	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya verifikasi perizinan, nonperizinan, perizinan berusaha sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah izin terverifikasi	Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**1. Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2. Meningkatnya Penanganan Konsultasi Informasi Pengaduan (KIP)**	**1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**1. Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**Pelayanan Terpadu Satu Pintu I**	**Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**	**Terselenggaranya Layanan KIP**	**Jumlah KIP yang diterima**	**Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan**	**Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun n**	**Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun n**	**Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**	**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**1. Tersedianya sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan 2. Terlaksananya pengelolaan data dan arsip penanaman modal, perizinan dannon perizinan**	**1. Jumlah sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang terkelola 2. Jumlah data dan arsip yang terkelola pada tahun n**	**Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja**	**1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral**	**1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun 2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**	**Sekretariat**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Tersedianya Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Ketua Tim Kerja Keuangan**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**	**Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai**	**Nilai Indeks Profesionalitas ASN**	**Hasil Nilai IP ASN DPMPTSP**	**Sekretariat**	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Tersedianya Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum**	**Sekretariat**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pengadaan Mebel**	**Tersedianya Mebel**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP**	**Jumlah belanja DPMPTSP yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA DPMPTSP dikali 100%**	**Sekretariat**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP**	**Jumlah belanja DPMPTSP yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA DPMPTSP dikali 100%**	**Sekretariat**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP**	**Jumlah belanja DPMPTSP yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA DPMPTSP dikali 100%**	**Sekretariat**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset**	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan oleh BPKAD**	**Sekretariat**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kota Yogyakarta

RENCANA STRATEGIS

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Tahun 2025-2029

Jalan Kemasan Nomor 39,
Kelurahan Purbayan,
Kemantren Kotagede, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55173

Hotline Telp, dan Faks :
(0274) 370188
Website:
kebudayaan.jogjakota.go.id

Email :
kebudayaan@jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029* dapat disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kebudayaan selama lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, serta mengacu pada visi jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045. Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta mempertimbangkan berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang mempengaruhi sektor kebudayaan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Keseluruhan proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur internal pemerintah daerah maupun komunitas budaya dan masyarakat. Diharapkan dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan kebudayaan secara komprehensif dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dinas agar lebih terarah, terukur, dan berdampak.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, data, dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya memajukan kebudayaan dan menjaga keistimewaan Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*)
Kota Yogyakarta

Yetti Martanti, S.Sos., M.M.
19730525 199803 2006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **8**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.1 Pembentukan Perangkat Daerah 8
2.1.2 Rincian Tugas dan Fungsi 9
2.1.3 Struktur Organisasi 31
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 33
2.2.1 Sumber Daya Manusia 33
2.2.2 Sarana Prasarana Instansi 34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 38
2.3.1 Lembaga Budaya 42
2.3.2 Warisan Budaya 44
2.3.3 Rintisan Kelurahan Budaya 50
2.3.4 Museum di Kota Yogyakarta 54
2.3.5 Bahasa 55
2.3.6 Adat Istiadat 56
2.3.7 Kesenian 58
2.3.8 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 58
2.3.9 Mitra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam Pemberian Pelayanan 59
2.3.10 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 59
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis 60
2.4.1 Permasalahan 60
2.4.2 Isu Strategis 62
2.5 Analisis terhadap Renstra K/L 69
2.6 Analisis terhadap Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY 70
2.7 Analisis terhadap RTRW 72
2.8 Analisis terhadap KLHS 72
2.9 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 74
2.9.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 74
2.9.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 77

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 80

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 80

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 82

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 85

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 85

3.5 Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; 87

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 89

4.2 Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 102

4.3 Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 113

4.4 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 114

BAB V PENUTUP..... 116

LAMPIRAN..... 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi Tahun 2024 34
Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2024 34
Tabel 2.3 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Per 2024 35
Tabel 2.4 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Per 2024 36
Tabel 2.5 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan UPT Pengelolaan Taman Budaya Per 2024 37
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 40
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Berdasarkan Dokumen RPD 2023–2025 40
Tabel 2.8 Tujuh Objek Kebudayaan 41
Tabel 2.9 Rekapitulasi Lembaga Budaya Ber-NIK Per Kemantren Tahun 2024 44
Tabel 2.10 Rekapitulasi Jenis Cagar Budaya di Kota Yogyakarta (Cut-Off Tahun 2024) 45
Tabel 2.11 Objek WBB yang Dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 46
Tabel 2.12 Warisan Budaya Tak Benda Kota Yogyakarta yang Telah Ditetapkan sampai Tahun 2024 49
Tabel 2.13 Klasifikasi RKB Tahun 2022–2024 52
Tabel 2.14 Klasifikasi RKB Tahun 2023 52
Tabel 2.15 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2019–2024 53
Tabel 2.16 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2019 53
Tabel 2.17 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2024 53
Tabel 2.18 Daftar Museum di Kota Yogyakarta 54
Tabel 2.19 Upacara Adat di Kota Yogyakarta 57
Tabel 2.20 Permasalahan terkait Kebudayaan di Kota Yogyakarta 61
Tabel 2.21 Isu Strategis Global Kebudayaan 64
Tabel 2.22 Isu Strategis Kebudayaan Nasional 65
Tabel 2.23 Isu Strategis Kebudayaan Regional 68
Tabel 2.24 Isu Strategis Perangkat Daerah 78
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 83
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 84
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 85
Tabel 3.4 Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 87
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 88
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 100

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 105
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 107
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 32
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 33
Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Taman Budaya 33
Gambar 2.4 Jumlah Lembaga Budaya Ber-NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses menyusun dan menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan untuk mencapai suatu tujuan. Tidak hanya itu, perencanaan merupakan proses menentukan apa yang menjadi target yang akan dicapai dan diikuti dengan tindakan konkret untuk mencapainya. Perencanaan mencakup tiga hal, yaitu apa yang akan diubah, apa yang akan dicapai, dan apa yang akan dilakukan. Tiga hal inilah yang menjadi kunci penting dalam keberhasilan suatu perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan kinerja menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja diartikan sebagai proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan.

Salah satu bentuk dokumen perencanaan adalah rencana strategis (Renstra). Dokumen Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 4 tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di perangkat daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Selain itu, dalam dokumen Renstra memuat indikator spesifik beserta target yang dapat diukur.

Dokumen Renstra merupakan manifestasi perwujudan komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD

Pemerintah Kota. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan dokumen Renstra didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja serta implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Melalui dokumen ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045. Berdasarkan dokumen RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045 dalam Perda tersebut, Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu ”Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan”. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta tersebut, maka pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berlandaskan pada dua aspek utama, yaitu landasan kebudayaan dan landasan keistimewaan.

Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta juga berkaitan erat dengan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta. RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta yang juga disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif. Selain RPJPD dan RPJMD, Renstra memiliki kaitan erat dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, yaitu sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra

Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mencakup Visi dan Misi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023–2043;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten Kota dan Kalurahan;

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
32. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021–2041; serta
33. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 adalah menjadi penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025–2029 dari aspek kebudayaan dengan memberikan gambaran ruang lingkup

kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025–2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Selain itu, Renstra ini menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, pelaku seni budaya maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta secara sinergis.

Sementara itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025–2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025–2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja yang bersifat tahunan.
6. Menjadi tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.
7. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan program kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sementara itu, ketugasan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta diatur berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta; serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mempunyai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan, tugas Pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan.

5. Pelaksanaan penugasan keistimewaan di bidang kebudayaan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Rincian Tugas dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mempunyai fungsi, yaitu:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sejarah dan permuseuman;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan bahasa dan sastra;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan kesenian;
10. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan kawasan cagar budaya dan pengelolaan taman budaya;
11. pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan urusan kebudayaan;
12. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kebudayaan;
13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
16. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
17. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
18. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
19. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
20. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Sekretariat

1. Sekretaris

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja pada bidang dan seksi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
f. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
i. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

k. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;

m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;

n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

p. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;

q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;

d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;

e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;

h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;

i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

k. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi, dan dokumentasi Dinas;

l. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;

m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

c. penatausahaan keuangan Dinas;

d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;

e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;

f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

h. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;

c. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;

e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

g. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

i. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Warisan Budaya;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Warisan Budaya;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda;
5. pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
6. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tak benda;
8. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kebudayaan;
10. pengoordinasian pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
11. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Warisan Budaya;
12. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Warisan Budaya;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Warisan Budaya;
14. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Warisan Budaya;

15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Bidang Warisan Budaya; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Warisan Budaya terdiri atas dua seksi, yaitu Seksi Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda.

1. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda

Seksi Warisan Budaya Benda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Warisan Budaya Benda mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Warisan Budaya Benda;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda;
c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya benda;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya benda;
e. pelaksanaan pengembangan sarana kawasan cagar budaya;
f. pelaksanaan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
h. pelaksanaan kerjasama dan publikasi warisan budaya benda;
i. pelaksanaan monitoring dan rehabilitasi warisan budaya benda;
j. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kebudayaan;
k. pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Warisan Budaya Benda;

m. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Warisan Budaya Benda;

n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Warisan Budaya Benda;

o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Warisan Budaya Benda;

p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Warisan Budaya Benda; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda

Seksi Warisan Budaya Tak Benda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Warisan Budaya Tak Benda mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Warisan Budaya Tak Benda;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tak benda;

c. pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya tak benda;

d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda;

e. pelaksanaan kerja sama dan publikasi pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda;

f. pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tak benda untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Seksi Warisan Budaya Tak Benda;

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Warisan Budaya Tak Benda;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Warisan Budaya Tak Benda;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Warisan Budaya Tak Benda;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Warisan Budaya Tak Benda; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra

Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra;
6. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
7. pengoordinasian pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;

9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
11. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
12. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra terdiri atas Seksi Sejarah dan Permuseuman serta Bahasa dan Sastra.

1. Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman

Seksi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sejarah dan Permuseuman mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Sejarah dan Permuseuman;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan sejarah dan permuseuman;
c. pelaksanaan pembinaan sejarah dan permuseuman;
d. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkajian sumber sejarah;
e. pelaksanaan peningkatan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kejuangan, wawasan kebangsaan, dan kepahlawanan;
f. pelaksanaan perlindungan, penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan permuseuman;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi jejaring permuseuman;
h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap museum;

i. pelaksanaan kerja sama dan publikasi pembinaan sejarah dan permuseuman;
j. pelaksanaan pembinaan sejarah dan permuseuman untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Sejarah dan Permuseuman;
l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Sejarah dan Permuseuman;
m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Sejarah dan Permuseuman;
n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Sejarah dan Permuseuman;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra

Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Bahasa dan Sastra;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan bahasa dan sastra;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra;
d. pelaksanaan pelindungan, penguatan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra;
e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkajian bahasa dan sastra;
f. pelaksanaan kerja sama dan publikasi pembinaan bahasa dan sastra;
g. pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Bahasa dan Sastra;

i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Bahasa dan Sastra;

j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Bahasa dan Sastra;

k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Bahasa dan Sastra;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Bahasa dan Sastra; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

D. Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni

Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, pembinaan lembaga budaya, serta pemeliharaan dan pengembangan kesenian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, pembinaan lembaga budaya, serta pemeliharaan dan pengembangan kesenian;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharan dan pengembangan adat dan tradisi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharan dan pengembangan seni;
7. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;

8. pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, pembinaan lembaga budaya, serta pemeliharaan dan pengembangan kesenian untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
11. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
12. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni;
13. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni terdiri atas Seksi Adat dan Tradisi, Seksi Lembaga Budaya, dan Seksi Seni.

1. Kepala Seksi Adat dan Tradisi

Seksi Adat dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Adat dan Tradisi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Adat dan Tradisi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan adat dan tradisi;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan adat dan tradisi;
e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan adat dan tradisi;
f. pelaksanaan reaktualisasi adat dan tradisi;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelestarian adat dan tradisi;

h. pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi;

i. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Adat dan Tradisi;

k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Adat dan Tradisi;

l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada pada Seksi Adat dan Tradisi;

m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Adat dan Tradisi;

n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Adat dan Tradisi; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kepala Seksi Lembaga Budaya

Seksi Lembaga Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan lembaga budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lembaga Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Lembaga Budaya;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan lembaga budaya;

c. pelaksanaan pembinaan lembaga budaya;

d. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan akreditasi lembaga budaya;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan Nomor Induk Kebudayaan Lembaga Budaya;

f. pelaksanaan perlindungan, penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya;

g. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan di Rintisan Kelurahan Budaya;
h. pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait pembinaan lembaga budaya;
i. pelaksanaan pembinaan lembaga budaya untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Lembaga Budaya;
k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Lembaga Budaya;
l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Lembaga Budaya;
m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Lembaga Budaya;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Lembaga Budaya; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3. Kepala Seksi Seni

Seksi Seni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan seni. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Seni mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Seni;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan dan pengembangan seni;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan kesenian;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
e. pelaksanaan pembinaan kesenian;
f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesenian;
g. pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait pemeliharaan dan pengembangan seni;
h. pemeliharaan dan pengembangan kesenian untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Seni;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Seni;

k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Seni;

l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Seni;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Seni; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

E. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

1. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPT PKCB mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya;

d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan cagar budaya;

e. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;

f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;

g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;

h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;

i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT:

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha;
i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
j. penatausahaan keuangan UPT;
k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
q. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;

s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan UPT;

t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;

u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Kawasan

Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di sekitar kawasan cagar budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya;

c. perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana kawasan cagar budaya;

d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;

e. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan kebersihan kawasan cagar budaya;

f. pelaksanaan dan pengoordinasian perawatan taman kawasan cagar budaya;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan;

h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan;

i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemeliharaan Kawasan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

4. Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan

Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan;
b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional pemanfaatan kawasan cagar budaya;
c. pelaksanaan pembinaan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan kawasan cagar budaya;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian perizinan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan keamanan kawasan cagar budaya;
f. pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan dan penyelenggaraan parkir dan kios di area parkir milik Pemerintah Daerah pada kawasan cagar budaya;
g. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi pertunjukan, pameran dan/atau kegiatan lainnya;
h. pelaksanaan pengelolaan Radio Widoro;
i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi UPT;
j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan;
k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan;
l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemanfaatan Kawasan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

F. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Taman Budaya yang meliputi Taman Pintar dan Taman Budaya Embung Giwangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan Taman Budaya;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Taman Budaya;
d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengembangan program Taman Budaya;
e. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya;
f. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT;
g. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha;
i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
j. penatausahaan keuangan UPT;
k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
q. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan UPT;
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

3. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan

Seksi Pelayanan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengembangan Taman Budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan dan pengembangan Taman Budaya;
c. pelaksanaan operasional layanan Taman Budaya;
d. pelaksanaan pengembangan program dan inovasi layanan Taman Budaya;
e. pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana operasional layanan Taman Budaya;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Taman Budaya;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis operasional layanan Taman Budaya;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

4. Kepala Seksi Kerja Sama dan Pemasaran

Seksi Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya;
c. pelaksanaan fasilitasi kehumasan Taman Budaya;
d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Taman Budaya;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan publikasi, promosi, dan pemasaran Taman Budaya;
f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama, publikasi, promosi, dan pemasaran Taman Budaya;
g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

2.1.3 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub. Bagian Keuangan;
c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, terdiri dari:

a. Seksi Warisan Budaya Benda;
b. Seksi Warisan Budaya Tak Benda.

4. Bidang Sejarah dan Bahasa, terdiri dari:

a. Seksi Sejarah dan Permuseuman;
b. Seksi Bahasa dan Sastra.

5. Bidang Adat, Seni dan Tradisi, terdiri dari:

a. Seksi Adat dan Tradisi;

b. Seksi Lembaga Budaya;

c. Seksi Seni.

6. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

a. Sub. Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pemeliharaan Kawasan;

c. Seksi Pemanfaatan Kawasan.

7. UPT Pengelolaan Taman Budaya

a. Sub. Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan;

c. Seksi Kerja Sama dan Pemasaran.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dapat diperhatikan pada bagan berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN

(*KUNDHA* KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

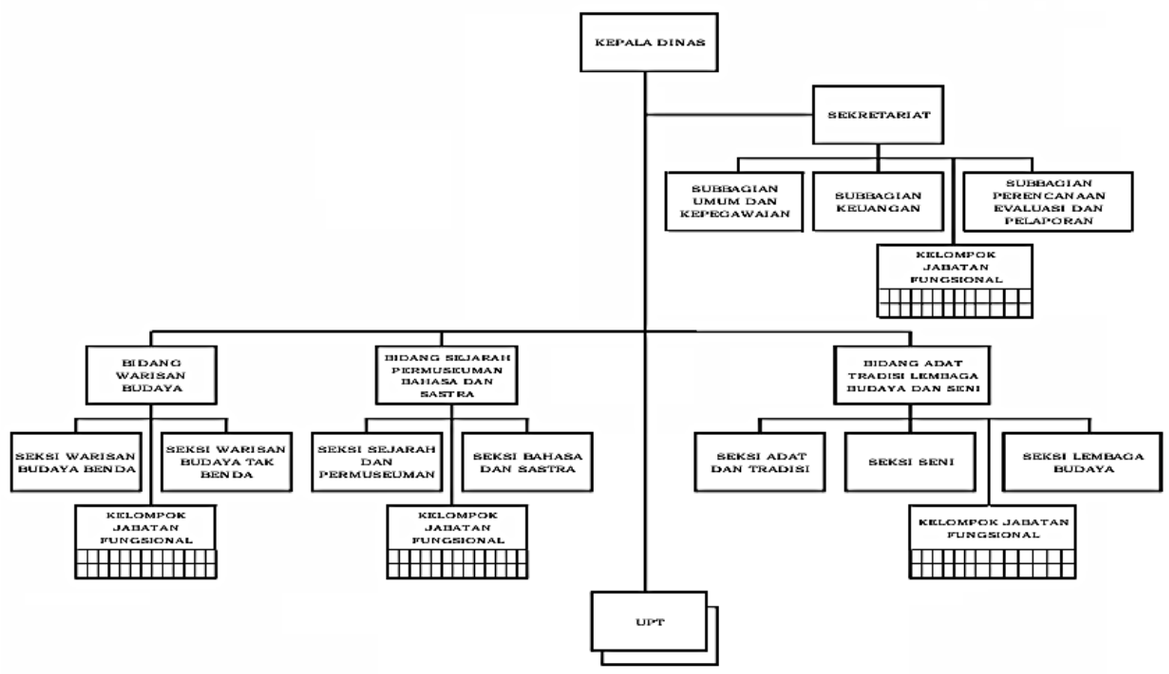

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2020

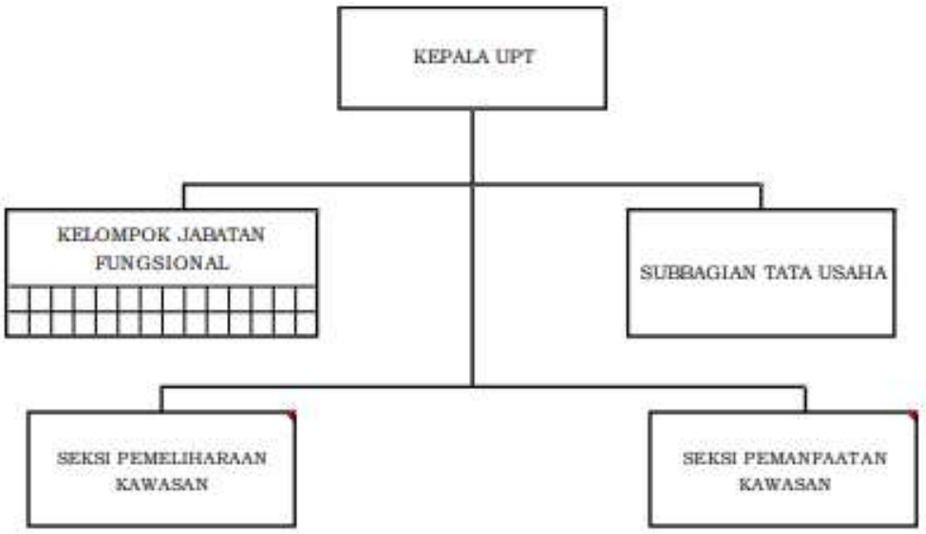

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2020

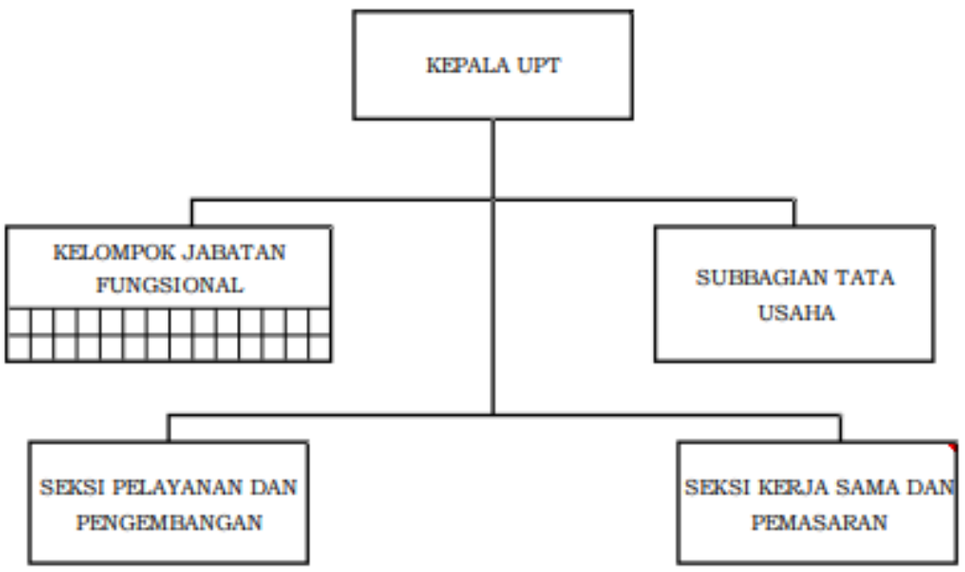

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Taman Budaya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian per Desember 2024 berdasarkan analisis beban kerja yang mencapai 64 ASN, 3 naban, dan 20 tenaga teknis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi Tahun 2024

No.	Bagian/Bidang	Eselonisasi					
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Naban	Tenaga Teknis
1.	Kepala Dinas	1					
2.	Sekretariat	-	1	3	11	1	-
3.	Bidang Warisan Budaya	-	1	2	7	-	4
4.	Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra	-	1	2	6	-	4
5.	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	-	1	3	7	-	8
8.	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	-	1	3	4	2	4
9.	UPT Pengelolaan Taman Budaya	-	1	2	7	-	-
Jumlah		**1**	**6**	**15**	**42**	**3**	**20**
Total		**87**					

Tabel 2. 2 Data Sumber Daya Manusia Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2024

No.	Bagian/Bidang	Latar Belakang Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	12	6	1	-	-
3.	Bidang Warisan Budaya	1	11	1	1	-	-
4.	Bidang Sejarah dan Bahasa	1	10	-	-	-	-
5.	Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	1	14	1	1	-	-
6.	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	1	8	3	2	-	-
7.	UPT Pengelolaan Taman Budaya	2	4	4	-	-	-
Jumlah		**8**	**59**	**15**	**5**	**0**	**0**

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan peningkatan kompetensinya.

2.2.2 Sarana Prasarana Instansi

Sarana Prasarana Instansi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta terdiri dari gedung beserta meja dan kursinya, komputer, bahan pustaka, kendaraan dinas, dan benda benda bercorak kebudayaan yang membantu pelaksanaan tugas. Per Desember 2024 Kantor Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta terdiri atas:

a. Bangunan induk ±323 m^2, dan pendopo seluas 142 m^2 sedangkan luas tanah ± 2157 m^2 yang berada di Jalan Kemasan No. 39, Purbayan, Kemantren Kotagede,

Kota Yogyakarta 55173 merupakan kantor utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

b. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang berlokasi di Jalan Tukangan No. 51, Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta 55271 memiliki luas bangunan 528m^2

c. UPT Pengelolaan Taman Budaya yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati No 1-3, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta 55122 memiliki luas bangunan 12.000m^3. Sedangkan untuk luas Taman Budaya Embung Giwangan yaitu 32.696m^2.

Tabel 2.3 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Per 2024

No	Objek	Uraian	Jumlah Barang
	1,3	**Aset Tetap**	**6908**
01	**1.3.01**	**Tanah**	**0**
	1.3.01.01	Tanah	0
02	**1.3.02**	**Peralatan dan Mesin**	**3585**
	1.3.02.01	Alat Besar	64
	1.3.02.02	Alat Angkutan	63
	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	42
	1.3.02.04	Alat Pertanian	6
	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2586
	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	281
	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	16
	1.3.02.08	Alat Laboratorium	199
	1.3.02.09	Alat Persenjataan	1
	1.3.02.10	Komputer	244
	1.3.02.11	Alat Eksplorasi	0
	1.3.02.12	Alat Pengeboran	0
	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
	1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	43
	1.3.02.16	Alat Peraga	22
	1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	0
	1.3.02.18	Rambu – Rambu	0
	1.3.02.19	Peralatan Olah Raga	18
03	**1.3.03**	**Gedung Dan Bangunan**	**76**
	1.3.03.01	Bangunan Gedung	50
	1.3.03.02	Monumen	10
	1.3.03.03	Bangunan Menara	0
	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	16
04	**1.3.04**	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**6**
	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2
	1.3.04.02	Bangunan Air	1
	1.3.04.03	Instalasi	2
	1.3.04.04	Jaringan	1

No	Objek	Uraian	Jumlah Barang
05	**1.3.05**	**Aset Tetap Lainnya**	**3241**
	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3072
	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	169
	1.3.05.03	Hewan	0
	1.3.05.04	Biota Perairan	0
	1.3.05.05	Tanaman	0
	1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
	1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	0
06	**1.3.06**	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0**
	1.3.06.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	1,5	**Aset Lainnya**	**693**
07	**1.5.02**	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**0**
	1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
08	**1.5.03**	**Aset Tidak Berwujud**	**60**
	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	60
09	**1.5.04**	**Aset Lain-Lain**	**633**
	1.5.04.01	Aset Lain-Lain	633
		Jumlah Aset	**7601**

Tabel 2.4 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Per 2024

No	Objek	Uraian	Jumlah Barang
	1,3	**Aset Tetap**	**834**
01	**1.3.01**	**Tanah**	**0**
	1.3.01.01	Tanah	0
02	**1.3.02**	**Peralatan dan Mesin**	**823**
	1.3.02.01	Alat Besar	8
	1.3.02.02	Alat Angkutan	17
	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	14
	1.3.02.04	Alat Pertanian	4
	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	606
	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	134
	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0
	1.3.02.08	Alat Laboratorium	0
	1.3.02.09	Alat Persenjataan	0
	1.3.02.10	Komputer	40
	1.3.02.11	Alat Eksplorasi	0
	1.3.02.12	Alat Pengeboran	0
	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
	1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	0
	1.3.02.16	Alat Peraga	0
	1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	0
	1.3.02.18	Rambu – Rambu	0
	1.3.02.19	Peralatan Olah Raga	0
03	**1.3.03**	**Gedung dan Bangunan**	**9**
	1.3.03.01	Bangunan Gedung	8
	1.3.03.02	Monumen	0
	1.3.03.03	Bangunan Menara	0

No	Objek	Uraian	Jumlah Barang
	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1
04	**1.3.04**	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**2**
	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1
	1.3.04.02	Bangunan Air	1
	1.3.04.03	Instalasi	0
	1.3.04.04	Jaringan	0
05	**1.3.05**	**Aset Tetap Lainnya**	**0**
	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	0
	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
	1.3.05.03	Hewan	0
	1.3.05.04	Biota Perairan	0
	1.3.05.05	Tanaman	0
	1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
	1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	0
06	**1.3.06**	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0**
	1.3.06.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	1,5	**Aset Lainnya**	**116**
07	**1.5.02**	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**0**
	1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
08	**1.5.03**	**Aset Tidak Berwujud**	**0**
	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	0
09	**1.5.04**	**Aset Lain-Lain**	**116**
	1.5.04.01	Aset Lain-Lain	116
		Jumlah Aset	**950**

Tabel 2.5 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan UPT Pengelolaan Taman Budaya Per 2024

No.	Objek	Uraian	Barang
	1,3	**Aset Tetap**	**5858**
01	**1.3.01**	**Tanah**	**0**
	1.3.01.01	Tanah	0
02	**1.3.02**	**Peralatan dan Mesin**	**2584**
	1.3.02.01	Alat Besar	76
	1.3.02.02	Alat Angkutan	31
	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	54
	1.3.02.04	Alat Pertanian	1
	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1720
	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	146
	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7
	1.3.02.08	Alat Laboratorium	248
	1.3.02.09	Alat Persenjataan	0
	1.3.02.10	Komputer	223
	1.3.02.11	Alat Eksplorasi	0
	1.3.02.12	Alat Pengeboran	0
	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
	1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	57
	1.3.02.16	Alat Peraga	21
	1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	0

No.	Objek	Uraian	Barang
	1.3.02.18	Rambu – Rambu	0
	1.3.02.19	Peralatan Olah Raga	0
03	**1.3.03**	**Gedung dan Bangunan**	**50**
	1.3.03.01	Bangunan Gedung	35
	1.3.03.02	Monumen	9
	1.3.03.03	Bangunan Menara	0
	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	6
04	**1.3.04**	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**3**
	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1
	1.3.04.02	Bangunan Air	0
	1.3.04.03	Instalasi	2
	1.3.04.04	Jaringan	0
05	**1.3.05**	**Aset Tetap Lainnya**	**3219**
	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3072
	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147
	1.3.05.03	Hewan	0
	1.3.05.04	Biota Perairan	0
	1.3.05.05	Tanaman	0
	1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
	1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	0
06	**1.3.06**	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**2**
	1.3.06.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	2
	1,5	**Aset Lainnya**	**29**
02	**1.5.02**	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**0**
	1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
03	**1.5.03**	**Aset Tidak Berwujud**	**29**
	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	29
04	**1.5.04**	**Aset Lain-Lain**	**0**
	1.5.04.01	Aset Lain-Lain	0
		Jumlah Aset	**5887**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki dua sasaran yang harus dicapai dalam kinerjanya. Kedua sasaran tersebut sebagai berikut.

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
2. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).

Capaian kinerja kedua sasaran strategis tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2020–2022 sebagai berikut.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024

No.	Sasaran Strategis	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat*	61%	61,90%	101,4%	67%	70,83%	105,7%	72%	80,65%	112%						
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan**										55,06 %	56,35%	102,34%	69,78 %	82,02%	117,54%
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)**										A	A	100%	A	A	100%

* Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022

** Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2022–2025

Adapun berdasarkan Dokumen RPD 2023–2025 dan diperbaiki melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, indikator sasaran program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
2. Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra
3. Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum
4. Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni
5. Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan
6. Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola UPT Pengelolaan Taman Budaya
7. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
8. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Capaian kinerja sasaran program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Berdasarkan Dokumen RPD 2023–2025

No.	Indikator Sasaran	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70,11%	70,33%	100,31%	79,55%	82,27%	103,42%
2.	Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra	76,61%	82,15%	107,23%	77,11%	82,77%	107,34%
3.	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76,61%	82,27%	107,39%	77,11%	82,3%	106,73%
4	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	82%	84,44%	102,97%	87%	95,56%	109,84%
5	Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola	84	88,04	104,80%	85	86,60	101,88%

No.	Indikator Sasaran	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
	UPT Pengelolaan Taman Budaya						
7	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	82,5	85,65	103,82%	82,5	83,93	101,73%
8	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100%	A	A	100%

Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak lepas dari objek kebudayaan. Dalam pelaksanaan kinerja ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Objek kebudayaan yang tercantum dalam Perdais Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.8 Tujuh Objek Kebudayaan

No.	Nama Objek	Definisi Objek
1.	Nilai-nilai budaya	Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud meliputi tata nilai budaya dan norma
2.	Pengetahuan dan Teknologi	Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. permainan rakyat, olah raga, b. penanggalan tradisional, c. senjata, d. alat kesenian, e. pakaian dan tata rias, f. kain, g. kuliner, h. jamu, i. pertanian, j. sistem irigasi, k. sistem ekonomi, l. arsitektur, m. alat transportasi, serta n. kearifan yang berkaitan dengan alam.
3.	Bahasa	Bahasa sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.
4.	Adat istiadat	Adat istiadat sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY.
5.	Tradisi luhur	Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud adalah yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain: a. hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti; b. pawukon; c. motif batik; d. grebeg, labuhan, sekaten; e. joglo, limasan; dan f. beksan serimpi, macapat.

No.	Nama Objek	Definisi Objek
6.	Benda	Benda sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; serta b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.
7.	Seni	Seni sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. seni pertunjukan; b. seni rupa; c. seni sastra; d. film; e. seni musik; f. seni media.

Dari tujuh objek kebudayaan tersebut, nilai-nilai budaya merupakan salah satu objek kebudayaan yang diimplementasikan dalam kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Nilai budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Rincian nilai budaya tersebut sebagai berikut.

1. Tata nilai religio-spiritual.
2. Tata nilai moral.
3. Tata nilai kemasyarakatan.
4. Tata nilai adat dan tradisi.
5. Tata nilai pendidikan dan pengetahuan.
6. Tata nilai teknologi.
7. Tata nilai penataan ruang dan arsitektur.
8. Tata nilai mata pencaharian.
9. Tata nilai kesenian.
10. Tata nilai bahasa.
11. Tata nilai benda cagar budaya dan kawasan c'agar budaya.
12. Tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan.

Kinerja perkembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta juga dapat ditinjau dari potensi budaya yang dikelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Secara rinci, potensi budaya di Kota Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1 Lembaga Budaya

Lembaga budaya dapat diartikan sebagai kelompok/organisasi/badan yang bertugas untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan budaya. Lembaga budaya dapat berupa lembaga publik, swadaya masyarakat, paguyuban,

atau sanggar. Lembaga budaya memiliki peran penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Berkaitan dengan ketugasan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam pelestarian kebudayaan, lembaga budaya menjadi salah satu komponen penting yang mendukung ketugasan tersebut. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelestarian kebudayaan tersebut dengan menerbitkan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) bagi lembaga budaya di Kota Yogyakarta. Lembaga-lembaga budaya yang ada di Kota Yogyakarta didorong untuk mengajukan NIKeb sebagai bukti legalitas lembaganya. Lembaga budaya yang telah memiliki NIKeb ini menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, yaitu "Persentase pelaku seni budaya yang aktif".

Pada 2020 jumlah lembaga budaya yang memiliki NIKeb sebanyak 16 lembaga budaya. Jumlah ini mengalami peningkatan pada 2021 sebanyak 80 lembaga budaya, pada 2022 mengalami peningkatan sebanyak 107 kelompok, pada 2023 mengalami peningkatan sebanyak 86 sanggar. Sementara itu, pada 2024 kenaikan sanggar sejumlah 80 sanggar sehingga total sanggar sampai dengan tahun 2024 sejumlah 369 sanggar yang telah memiliki NIKeb. Data tersebut tergambarkan dalam grafik berikut.

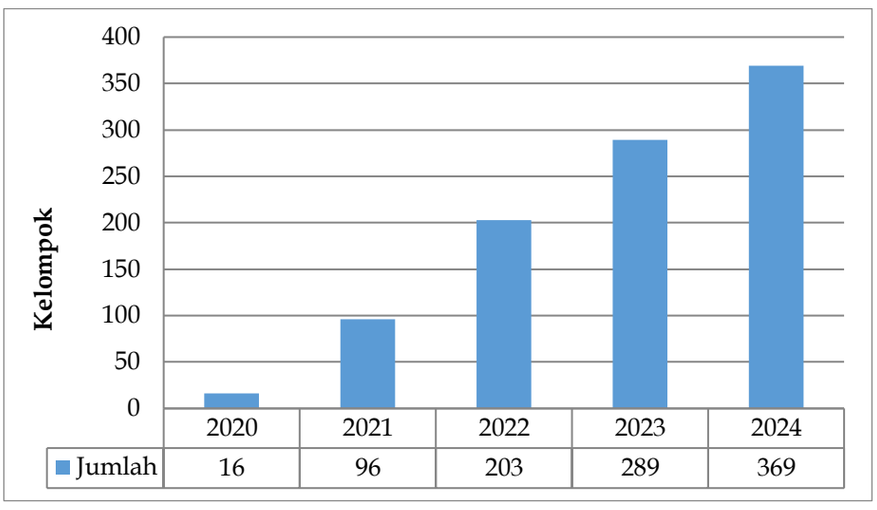

Gambar 2.4 Jumlah Lembaga Budaya Ber-NIKeb di Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024

Adapun rekapitulasi sanggar/lembaga budaya yang terdaftar Nomor Induk Kebudayaan per Kemantren sampai bulan Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Lembaga Budaya Ber-NIKeb Per Kemantren Tahun 2024

No.	Kemantren	Total Sanggar
1.	Danurejan	19
2.	Gedongtengen	17
3.	Gondomanan	19
4.	Jetis	18
5.	Kotagede	34
6.	Kraton	32
7.	Mantrijeron	25
8.	Mergangsan	36
9.	Ngampilan	15
10.	Pakualaman	14
11.	Tegalrejo	32
12.	Umbulharjo	67
13.	Gondokusuman	20
14.	Wirobrajan	21
TOTAL		**369**

Peningkatan jumlah lembaga budaya ber-NIKeb tidak lepas dari pendampingan intensif terhadap sanggar-sanggar dan lembaga budaya di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memberikan fasilitasi bagi lembaga budaya yang telah ber-NIKeb. Fasilitasi ini memotivasi lembaga budaya lainnya yang belum memiliki NIKeb untuk mendaftarkan lembaga/sanggarnya.

Peningkatan jumlah lembaga budaya yang terdaftar Nomor Induk Kebudayaan setiap tahunnya juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan meningkat. Hal ini karena setiap lembaga budaya beranggotakan sejumlah orang yang memiliki minat, ketertarikan, dan bahkan mata pencaharian di bidang seni budaya. Semakin banyak jumlah lembaga budaya yang terdaftar Nomor Induk Kebudayaan semakin banyak pula masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dapat dikatakan, keberadaan lembaga budaya, terutama lembaga budaya yang telah ber-NIKeb sangat mendukung kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya di Kota Yogyakarta.

2.3.2 Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan suatu hasil dari budaya fisik yang berbentuk nilai-nilai tradisi masa lalu. Warisan budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Warisan budaya juga menjadi salah satu komponen indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, yaitu "Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan". Indikator ini terdiri atas Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb).

1. Warisan Budaya Benda (WBB)

Warisan budaya benda dapat diartikan sebagai warisan budaya berupa benda-benda yang bersifat material atau fisik, serta dapat dilihat dan disentuh/diraba. Warisan budaya benda perlu dilakukan upaya pelestarian agar keberadaannya dapat tetap terjaga.

Warisan budaya benda yang telah dikaji dan dilakukan upaya pelestarian terkait dengan nilai pentingnya dikenal dengan istilah cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan undang-undang tersebut, cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, serta kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan dilindungi karena nilai pentingnya.

Cagar budaya di Kota Yogyakarta berdasarkan kategorinya sampai tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Jenis Cagar Budaya di Kota Yogyakarta

(Cut-Off Tahun 2024)

No.	Kategori Cagar Budaya	Jumlah
1.	Bangunan	233
2.	Struktur	16
3.	Benda	14
4.	Situs	14
5.	Kawasan	4
Total		**281**

Selain cagar budaya, di Kota Yogyakarta ada beberapa bangunan yang masih berstatus Objek diduga Cagar Budaya. Objek Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. Sehingga objek yang diduga cagar budaya masih menunggu penetapan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Hingga 2024 ada 42 objek warisan budaya benda di Kota Yogyakarta yang dilestarikan, dalam hal ini direkomendasikan sebagai cagar budaya. Data 42 objek warisan budaya benda tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.11 Objek WBB yang Dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Daftar CB SK Kota	Alamat	Keterangan	SK
1.	nDalem Brontokusuman / nDalem Pugeran (Kediaman Keluarga KGPH. Puger-HB VIII)	Brontokusuman MG III/285	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2017
2.	nDalem Gede Notoyudan - HB VII	Jl. Notoyudan GT II/1303	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2018
3.	Bangsal Kepatihan Pakualaman	Jl. Masjid no. 5	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 202 Tahun 2018
4.	Rumah Tinggal Mariana Puji	Jl. Bintaran Tengah no. 12	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 203 Tahun 2019
5.	nDalem Pujowinatan	Pujowinatan PA I/717	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 204 Tahun 2019
6.	Rumah Kalang Kotagede/ Rumah Tinggal DR. Nasir Tamara, M.A, M.Sc., APO /nDalem NATAN	Jl. Mondorakan no. 5	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 205 Tahun 2019
7.	Gedung Jefferson di Jl. Diponegoro No. 19	Jl. Diponegoro no. 19	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
8.	Bangunan Hotel Mustokoweni	Jl. A.M. Sangaji no.72	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
9.	Bangunan Rumah di Jalan Tirtodipuran No. 63	Jl. Tirtodipuran no. 63	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
10.	Bangunan Rumah Flat Jl. Jendral Sudirman	Jl. Jendral Sudirman	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
11.	Asrama Marguyuwono	Jl. Langenastran Lor no. 11	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
12.	Bangunan Gardu ANIEM di Jl. Abu Bakar Ali	Jl. Abu Bakar Ali	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
13.	Bangunan Rumah Kalang di Jl. Tegalgendu No. 20	Jl. Tegalgendu no. 20	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021

No.	Daftar CB SK Kota	Alamat	Keterangan	SK
14.	Bangunan Rumah Kalang di Jl. Tegalgendu No. 28	Jl. Tegalgendu no. 28	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
15.	Pendapa Kesenian di Museum Negeri Sonobudoyo Unit I	Jl. Pangurakan no. 6	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
16.	Bangunan Masjid Syuhada	Jl. I Dewa Nyoman Oka no. 13	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
17.	Bangunan Atap Berundak Eks-Salon Coiffeur di Jl. Malioboro No. 1	Jl. Malioboro no. 1	Bangunan	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021
18.	Batu Komboran Kuda peninggalan Pangeran Diponegoro	Jl. HOS Cokroaminoto TR III/430	Benda	Keputusan Wali Kota Nomor 383 Tahun 2021
19.	Genta Kalasan koleksi Museum Negeri Sonobudoyo	Jl. Pangurakan No. 6	Benda	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 383 Tahun 2021
20.	Gamelan Megamendung koleksi Museum Negeri Sonobudoyo	Jl. Pangurakan No. 6	Benda	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 383 Tahun 2021
21.	Wayang Cina-Jawa (Wacinwa) koleksi Museum Negeri Sonobudoyo	Jl. Pangurakan No. 6	Benda	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 383 Tahun 2021
22.	Pasren koleksi Museum Negeri Sonobudoyo	Jl. Pangurakan No. 6	Benda	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 383 Tahun 2021
23.	Tugu Jam Margamulya	Jl. Margamulya	Struktur	Keputusan Wali Kota Yogyakarta 501 Tahun 2021
24.	Tembok jebol peninggalan Pangeran Diponegoro	Jl. HOS Cokroaminoto TR III/430	Struktur	Keputusan Wali Kota Yogyakarta 501 Tahun 2021
25.	Lokasi peninggalan Pangeran Diponegoro	Jl. HOS Cokroaminoto TR III/430	Situs	Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2021
26.	Rumah Tradisional Jawa Jl. Tegal Gendu no. 07 (Rumah Kalang Keluarga M gunung WS)	Jl. Tegal Gendu No. 7 RT. 53 RW. 11	Bangunan	SK 2023
27.	Nogobondo	RT 25 RW 08, Rejowinangun, Kotagede	Benda	SK 2023
28.	Sisa Pagar Keliling Pesanggrahan Madyaketawang (Benteng Peleman)	Barat: Jl. Pelemsari dan Timur: Jl.Depokan II Rejowinangun	Struktur	SK 2023
29.	Pesanggrahan Rejowinangun Sisi Barat (Warungboto)	Jl. Veteran No. 77	Bangunan	SK 2023

No.	Daftar CB SK Kota	Alamat	Keterangan	SK
30.	Ndalem Pugeran-sepuh (HB VII)/ Bangsal Aula SMA Negeri 7 Yogyakarta	Jl. MT. Haryono No.47	Bangunan	SK 2023
31.	Bangunan Eks Rumah Sakit Mata Jenggotan Yogyakarta	Jl. Jenggotan no. 5A	Bangunan	SK 2023
32.	Kantor KADIN DIY	Jl. Sultan Agung No. 8 Yogyakarta	Bangunan	SK 2023
33.	SD Lempuyangwangi	Jl. Hayam Wuruk No. 9	Bangunan	SK 2023
34.	Ruko Ketandan Lor No.56 (Toko Oni)	Jl. Ketandan Lor No. 56	Bangunan	SK 2023
35.	Ruko di Jl. Ketandan Lor No 35 (Ibu Widiastuti)	Jl. Ketandan Lor No. 35	Bangunan	SK 2023
36.	Ruko di Jl Kerandan Lor No 66 (Toko Anton Hidayat)	Jl. Ketandan Lor No. 66	Bangunan	SK 2023
37.	nDalem Ngadinegaran (Laboratorium Kesehatan)	Ngadinegaran MJ II/62	Bangunan	SK 2024
38.	Rumah Tradisional Kotagede dan Langgar Dhuwur (H. Zubair)	Boharen KG III/853, Purbayan, Kotagede	Bangunan	SK 2024
39.	SMPN 3 Yogyakarta	Jl. Pajeksan No. 18 Ngupasan	Bangunan	Kajian 2024
40.	SD Negeri Jetis Yogyakarta	Jl. Pasiraman No. 2 Cokrodiningratan	Bangunan	Kajian 2024
41.	Gedung PP Muhammadiyah	Jl. KHA Dahlan No. 102 Notoprajan	Bangunan	Kajian 2024
42.	Joglo Uleng	Gg. Kalimasada No. 40 Giwangan	Bangunan	Kajian 2024

2. Warisan Budaya Tak Benda (WBTb)

Warisan budaya tak benda (WBTb) dapat diartikan sebagai segala bentuk pengetahuan, keterampilan, praktik, representasi, ekspresi, dan ruang budaya yang dilestarikan dari generasi ke generasi. WBTb merepresentasikan identitas, nilai, dan keunikan suatu kelompok masyarakat. Selain itu, WBTb mencerminkan sejarah panjang yang membentuk kehidupan sosial budaya masyarakat di suatu daerah.

Seperti yang telah dijelaskan, predikat Kota Budaya yang melekat pada Kota Yogyakarta dibuktikan dengan kekayaan warisan budaya, termasuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Hingga 2024 sejumlah 26 objek WBTb Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi WBTb Nasional. WBTb yang ditetapkan adalah WBTb yang telah ditetapkan oleh Kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini

Kementerian Kebudayaan). Berikut WBTb Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sampai tahun 2024.

Tabel 2.12 Warisan Budaya Tak Benda Kota Yogyakarta yang Telah Ditetapkan sampai Tahun 2024

No.	Objek WBTb	Tahun Penetapan	Dasar Penetapan	Keterangan
1.	Kertas Daluang	2014	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 270/P/2014	Kerajinan Tradisional
2.	Gudeg	2015	Keputusan Menter Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 186/M/2015	Kuliner Tradisional
3.	Upacara Mubeng Benteng	2015	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 186/M/2015	Upacara/Ritus
4.	Upacara Tarapan Yogyakarta	2015		Upacara/Ritus
5.	Jathilan Yogyakarta	2016	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 244/P/2016	Seni Tradisi
6.	Bakpia	2016	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 244/P/2016	Kuliner Tradisional
7.	Wayang Kancil Yogyakarta	2018	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 264/M/2018	Seni Tradisi
8.	Dawet Camcau Yogyakarta	2019	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 362/M/2019	Kuliner Tradisional
9.	Kipo	2019	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 362/M/2019	Kuliner Tradisional
10.	Kerajinan Perak Kotagede	2021	Nomor Sertifikat: 0006/F4/KB/04.04/ 2021	Kerajinan Tradisional
11.	Jemparingan Yogyakarta	2021	Nomor Sertifikat: 0006/F4/KB.04.04/2021	Permainan Tradisional
12.	Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara	2021	Nomor Sertifikat: 0006/F4/KB.04.04/2021	Tradisi Lisan
13.	Jadah Manten	2022	Nomor Sertifikat: 3034/F4/ KB.09.06/ 2022	Kuliner Tradisional
14.	Legomoro	2022	Nomor Sertifikat: 3034/F4/KB.09.06/2022	Kuliner Tradisional
15.	Sangga Buwana	2022	Nomor Sertifikat: 3034/F4/KB.09.06/2022	Kuliner Tradisional
16.	Kembang Waru	2022	Nomor Sertifikat: 3034/F4/KB.09.06/2022	Kuliner Tradisional
17.	Yangko Yogyakarta	2022	Nomor Sertifikat: 3034/F4/KB.09.06/2022	Kuliner Tradisional
18.	Bir Jawa	2022		Kuliner Tradisional
19.	Tari Klana Alus Dasalengkara	2023	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 315/M/2023	Seni Tradisi
20.	Cublak-Cublak Suweng	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Seni Tradisi
21.	Tari Klana Raja	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Seni Tradisi
22.	Tari Kuda-Kuda	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Seni Tradisi
23.	Tari Wira Pertiwi	2024	Keputusan Permendikbudristek RI	Seni Tradisi

No.	Objek WBTb	Tahun Penetapan	Dasar Penetapan	Keterangan
			Nomor 446/M/2024	
24.	Ketan Lupis Yogyakarta	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Kuliner Tradisional
25.	Becak Yogyakarta	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Teknologi Tradisional
26.	Kopi Joss	2024	Keputusan Permendikbudristek RI Nomor 446/M/2024	Kuliner Tradisional

Selain WBTb yang telah ditetapkan, masih banyak objek WBTb yang dimiliki Kota Yogyakarta. Objek WBTb ini ada yang telah dicatat dan belum tercatat. Objek WBTb yang tercatat adalah data WBTB yang telah tercatat di database WBTb milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Objek WBTb yang belum tercatat adalah potensi warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Kota Yogyakarta namun belum dilakukan pencatatan di database warisan budaya tak benda milik Kemdikbud. Berdasarkan Data Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, sebanyak 103 objek WBTb yang telah dicatatkan dalam database Kemendikbud. Sementara itu, sebanyak 57 objek WBTb Kota Yogyakarta belum tercatat.

2.3.3 Rintisan Kelurahan Budaya

Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat. Setiap kelurahan yang ditetapkan sebagai RKB harus melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasikan, mengembangkan, dan menggali potensi kekayaan budaya yang dimiliki.

Setiap RKB mendapat pembinaan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam beberapa bentuk yaitu:

a. peningkatan manajemen (peningkatan kapasitas SDM dan penguatan tatakelola kelembagaan);
b. pelestarian potensi budaya;
c. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis; serta
d. dukungan promosi dan informasi.

Proses penetapan RKB dimulai dengan usulan dari kelurahan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, berdasarkan usulan dari kelurahan-kelurahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan akreditasi RKB. Akreditasi RKB adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi budaya serta

partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya di wilayah (kelurahan) yang belum ditetapkan menjadi Rintisan Kelurahan Budaya, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan RKB baru.

Beberapa aspek yang dinilai dalam akreditasi RKB yaitu adat dan tradisi; kesenian dan permainan rakyat; bahasa, sastra dan aksara; kerajinan, kuliner, dan pembuatan obat tradisional; penataan ruang dan bangunan serta warisan budaya.

Akreditasi RKB juga dilaksanakan untuk mengklasifikasikan RKB. Berdasarkan perkembangannya, RKB diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Tumbuh
b. Berkembang
c. Maju

Kegiatan pembinaan dan pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan budaya di wilayah kantong-kantong budaya, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai upaya pengembangan kebudayaan secara luas. Melalui kegiatan pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya ini diharapkan karakter dan nilai-nilai keyogyakartaan dapat terangkat dan terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Rintisan Kelurahan Budaya.

Dalam rangka menyiapkan suatu kelurahan menjadi kelurahan budaya, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta telah mengembangkan program Rintisan Kelurahan Budaya. Kelurahan rintisan yang ditunjuk, difasilitasi melalui pembinaan dengan berbagai program di antaranya melalui penyelenggaraan event gelar potensi. Hingga tahun 2024 ada tujuh kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah berstatus Kelurahan Budaya. Ketujuh Kelurahan Budaya tersebut yaitu:

a. Kelurahan Terban
b. Kelurahan Kricak
c. Kelurahan Gedongkiwo
d. Kelurahan Purbayan
e. Kelurahan Prenggan
f. Kelurahan Warungboto
g. Kelurahan Cokrodiningratan

Adapun proses penetapan Rintisan Kelurahan Budaya dimulai dengan usulan dari kelurahan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, berdasarkan usulan dari kelurahan-kelurahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan akreditasi RKB. Berdasarkan perkembangannya, RKB diklasifikasikan menjadi Tumbuh, Berkembang, dan Maju.

Pada 2024 Akreditasi RKB dilaksanakan di tujuh kelurahan. Berdasarkan hasil akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) Kota Yogyakarta Tahun 2024, kelurahan yang termasuk klasifikasi Pra-RKB, yaitu Kelurahan Bener dan Kelurahan Gowongan. Sementara itu, terdapat lima kelurahan yang masuk dalam kategori Tumbuh, yaitu, Kelurahan Klitren, Kelurahan Muja Muju, Kelurahan Sosromenduran, dan Kelurahan Suryodiningratan. Sementara itu, Kelurahan Ngupasan berhasil masuk dalam kategori Berkembang.

Dengan demikian, total RKB sampai dengan tahun 2024 sebanyak 36 RKB dengan klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.13 Klasifikasi RKB Tahun 2022–2024

No.	Klasifikasi RKB	2022	2023	2024
1.	Tumbuh	15	18	22
2.	Berkembang	12	13	14
3.	Maju	4	0	0
	TOTAL	**31**	**31**	**36**

Adapun rincian klasifikasi per kelurahan sebagai berikut.

Tabel 2.14 Klasifikasi RKB Tahun 2023

No.	Kelurahan	Klasifikasi
1.	Kelurahan Patangpuluhan	Tumbuh
2.	Kelurahan Brontokusuman	Tumbuh
3.	Kelurahan Bumijo	Tumbuh
4.	Kelurahan Demangan	Tumbuh
5.	Kelurahan Tahunan	Tumbuh
6.	Kelurahan Baciro	Tumbuh
7.	Kelurahan Keparakan	Tumbuh
8.	Kelurahan Gunungketur	Tumbuh
9.	Kelurahan Wirogunan	Tumbuh
10.	Kelurahan Mantrijeron	Tumbuh
11.	Kelurahan Bausasran	Tumbuh
12.	Kelurahan Sorosutan	Tumbuh
13.	Kelurahan Patehan	Tumbuh
14.	Kelurahan Giwangan	Tumbuh
15.	Kelurahan Prawirodirjan	Tumbuh

No.	Kelurahan	Klasifikasi
16.	Kelurahan Karangwaru	Tumbuh
17.	Kelurahan Panembahan	Tumbuh
18.	Kelurahan Tegalrejo	Tumbuh
19.	Kelurahan Klitren	Tumbuh
20	Kelurahan Muja Muju	Tumbuh
21.	Kelurahan Sosromenduran	Tumbuh
22.	Kelurahan Suryodiningratan	Tumbuh
23.	Kelurahan Notoprajan	Berkembang
24.	Kelurahan Kadipaten	Berkembang
25.	Kelurahan Pandeyan	Berkembang
26.	Kelurahan Ngampilan	Berkembang
27.	Kelurahan Wirobrajan	Berkembang
28.	Kelurahan Tegalpanggung	Berkembang
29.	Kelurahan Pringgokusuman	Berkembang
30.	Kelurahan Kotabaru	Berkembang
31.	Kelurahan Purwokinanti	Berkembang
32.	Kelurahan Rejowinangun	Berkembang
33.	Kelurahan Pakuncen	Berkembang
34.	Kelurahan Semaki	Berkembang
35.	Kelurahan Suryatmajan	Berkembang
36.	Kelurahan Ngupasan	Berkembang

Tabel 2.15 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2019–2024

No.	Klasifikasi RKB	2019	2024
1.	Tumbuh	N/A	3
2.	Berkembang	2	4
3.	Maju	N/A	N/A
	TOTAL	**2**	**7**

Adapun rincian klasifikasi per kelurahan tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.16 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2019

No.	Kelurahan	Kemantren	Klasifikasi Tahun 2019	Klasifikasi Tahun 2024	Keterangan
1.	Kricak	Tegalrejo	Berkembang	Berkembang	Tetap
2.	Terban	Gondokusuman	Berkembang	Berkembang	Tetap

Adapun rincian klasifikasi per kelurahan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Klasifikasi Kelurahan Budaya Tahun 2024

No.	Kelurahan	Kemantren	Klasifikasi
1.	Kricak	Tegalrejo	Berkembang
2.	Terban	Gondokusuman	Berkembang
3.	Gedongkiwo	Mantrijeron	Berkembang
4.	Purbayan	Kotagede	Berkembang
5.	Cokrodiningratan	Jetis	Tumbuh
6.	Prenggan	Kotagede	Tumbuh
7.	Warungboto	Umbulharjo	Tumbuh

2.3.4 Museum di Kota Yogyakarta

Salah satu predikat Kota Yogyakarta adalah "Kota Perjuangan". Predikat ini tidak lepas dari sejarah perjuangan panjang yang tercatat di Kota Yogyakarta. Berbagai peristiwa penting pada masa lalu ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki nilai penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa kini ejarah perjuangan yang tercatat di Kota Yogyakarta ini dapat disaksikan melalui beberapa koleksi museum yang ada di Kota Yogyakarta.

Museum menjadi salah satu media/ruang untuk belajar tentang sejarah dan warisan budaya. Pembelajaran di museum dapat menjadi sarana penanaman dan transformasi nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Selain itu, keberadaan museum diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal, mengunjungi, dan memaknai narasi yang ada dalam tiap koleksinya.

Hingga tahun 2024 ada sebanyak 19 museum di Kota Yogyakarta. Museum-museum ini memiliki keunikan masing-masing. Data ke-19 museum ini sebagai berikut.

Tabel 2.18 Daftar Museum di Kota Yogyakarta

No.	Nama Museum	Alamat	Keterangan
1.	Museum Keraton Yogyakarta	Jln. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta	Budaya- Kraton Yogyakarta
2.	Museum Pura Pakualaman	Jln. Masjid No.46 Pakualaman (Kompleks Puro Pakualaman Yogyakarta)	Budaya – Pura Pakualaman
3.	Museum Sonobudoyo	Jln. Pangurakan No. 6 (Wijilan)	Budaya – Pemerintah Provinsi DIY
4.	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	Jln. Margo Mulyo No. 6 Yogyakarta	Perjuangan – Pemerintah Pusat (Kemendikbud)
5.	Museum Sandi Yogyakarta	Jln. Faridan M Noto No. 21 Kotabaru	Perjuangan – Lembaga Negara BSSN
6.	Museum Bank Indonesia	Jln. Panembahan Senopati No. 4-6 (Kompleks Bank BI Yogyakarta)	Pengetahuan – Lembaga
7.	Museum Dewantara Kirti Griya	Jln. Tamansiswa Wirogunan Yogyakarta	Pengetahuan – Swasta Yayasan
8.	Museum Dr. Yap	Jln. Cik Di Tiro No.5 Terban	Pengetahuan – Swasta Yayasan
9.	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Jln. Jenderal Sudirman No. 75 Yogyakarta	Perjuangan – Disjarah AD
10.	Museum Sasimitaloka Panglima Besar Jenderal Soedirman	Jln. Bintaran Wetan No. 3 Yogyakarta	Perjuangan – Disjarah AD

No.	Nama Museum	Alamat	Keterangan
11.	Museum Biologi	Jln. Sultan Agung No. 22 Yogyakarta	Pengetahuan – UGM
12.	Museum Sains Taman Pintar	Jln. Panembahan Senopati No. 1-3 (Kompleks UPT Taman Budaya)	Pengetahuan – Pemerintah Kota Yogyakarta
13.	Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta	Jln. Ahmad Yani Ngupasan Yogyakarta	Perjuangan – Sekretariat Negara
14.	Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro	Jln. Hos Cokroaminoto TR-III/430 Tegalrejo	Perjuangan – Pangdam V Diponegoro
15.	Museum Bahari	Jln. RE Martadinata No. 69 Yogyakarta	Perjuangan – Swasta Pribadi
16.	Museum Batik dan Sulaman	Jln. Dr. Sutomo No. 13A Yogyakarta	Budaya - Swasta
17.	Museum Perjuangan	Jln. Kolonel Sugiyono No. 24 Yogyakarta	Perjuangan - Pemerintah Pusat (Kemendikbud)
18.	Museum Gembira Loka	Jln. Kebun Raya No.2 Yogyakarta	Pengetahuan – Swasta
19.	Intro Living Museum Kotagede	Jln. Tegal Gendu No. 20 Prenggan Yogyakarta	Budaya - Pemerintah Provinsi DIY

2.3.5 Bahasa

Sebagai Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, banyak masyarakat dari daerah lain yang mengunjungi bahkan menetap sementara di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menjadikan Kota Yogyakarta didominasi oleh kaum urban yang memiliki keragaman latar belakang budaya, termasuk bahasa. Keragaman ini tentu menjadi tantangan bagi upaya pelestarian budaya, terutama bahasa lokal.

Sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta adalah orang suku Jawa yang menggunakan bahasa Jawa. Selain penduduk asli, Kota Yogyakarta juga dihuni oleh pendatang atau perantau dari daerah lain yang membawa bahasa daerahnya, seperti bahasa Minang digunakan oleh Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta, bahasa Bali digunakan oleh Paguyuban Keluarga Putra Bali di Yogyakarta, bahasa Banjar digunakan oleh Kerukunan Keluarga Banjar di Yogyakarta, dan lain-lain. Bahasa daerah selain Jawa ini hidup dan berkembang di Kota Yogyakarta.

Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, di Kota Yogyakarta juga berkembang bahasa Asing. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Asing juga menjadi bagian dari bahasa yang digunakan penduduk Kota Yogyakarta dalam penggunaan teknologi modern dan pergaulan internasional. Meskipun belum

ditengarai adanya komunitas bahasa asing, tetapi bahasa asing digunakan di Kota Yogyakarta. Hotel-hotel dan fasilitas umum di Yogyakarta tidak sedikit yang menggunakan bahasa asing.

2.3.6 Adat Istiadat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Masyarakat Kota Yogyakarta masih menjunjung tinggi adat istiadat kebudayaan jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tampak dalam pelaksanaan upacara adat maupun tradisi dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Upacara adat merujuk pada sistem norma, aturan, atau perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat dan dianggap mengatur hubungan sosial dalam komunitas tersebut. Masyarakat biasanya melaksanakan upacara adat biasanya untuk memperingati hari tertentu dan pada waktu tertentu.

Upacara adat yang dilaksanakan masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Kota Yogyakarta biasanya mencakup beberapa hal berikut.

1. Prosesi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah upacara adat. Prosesi mencakup tata laksana dari awal hingga selesai sebuah upacara adat dan melibatkan semua unsur secara sistematis.
2. *Ujub* adalah penyampaian maksud dan niat dalam sebuah upacara adat.
3. Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran, keselamatan, dan dikabulkan apa yang menjadi ujub upacara adat tersebut.
4. *Kembul Bujana* adalah seremonial *dhahar*/makan bersama sebagai simbol kerukunan dan gotong royong di dalam masyarakat.
5. *Pahargyan* adalah istilah yang merujuk pada resepsi atau acara syukuran dalam berbagai upacara ritual, seperti pernikahan, khitanan, dan labuh laut. Pahargyan bisa diwujudkan dalam pentas pertunjukan.

Upacara adat yang masih dilaksanakan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 2.19 Upacara Adat di Kota Yogyakarta

No.	Nama Upacara Adat	Keterangan
1.	Upacara Adat Daur Hidup	Upacara yang diselenggarakan mengikuti siklus kehidupan manusia, kelahiran-pernikahan-kematian
2.	Upacara Adat Tingkeban	Upacara Adat dalam siklus daur hidup saat usia kandungan tujuh bulan
3.	Upacara Adat Tedak Siten	Upacara Adat dalam siklus daur hidup saat usia anak mencapai 35 Hari/ *selapan*
4.	Upacara Adat Supitan	Upacara Adat anak laki-laki yang masuk usia remaja dengan cara dikhitan
5.	Upacara Adat Tarapan/Tetesan	Upacara Adat anak anak perempuan yang masuk usia remaja
6.	Upacara Panggih Temanten	Upacara Pernikahan dengan adat Jawa
7.	Tradisi Merti Kali Code	Tradisi memohon doa agar sungai membawa berkah dan kesejahteraan bagi masyarakat serta terhindarkan dari bencana
8.	Tradisi Merti Kali Buntung	Tradisi memohon doa agar sungai membawa berkah dan kesejahteraan bagi masyarakat serta terhindarkan dari bencana
9.	Tradisi Ruwahan Apem	Tradisi masyarakat yang dilakukan menjelang bulan puasa yang intinya memohon doa kepada Tuhan YME serta memohon maaf antar etika, apem melambangkan sifat permohonan maaf
10.	Tradisi Nyadran	Tradisi membersihkan makam leluhur secara bersama-sama dan mendoakannya, dilakukan menjelang bulan puasa
11.	Tradisi Bakdo Kupat	Tradisi masyarakat saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi setelah Idul Fitri yang disimbolkan dengan ketupat
12.	Tradisi Unduh-Unduh	Tradisi unduh-unduh merupakan ungkapan rasa syukur jemaat gereja untuk masyarakat atas rezeki yang dikaruniakan dari Tuhan.
13.	Upacara Adat Tumbuk Ageng (Perkawinan)	Upacara yang diselenggarakan menandai usia perkawinan seseorang mencapai 64 tahun
14.	Upacara Adat Jenang Suran	Upacara yang dilakukan untuk menyambut bulan suro/muharam disimbolkan dengan ubarampe jenang
15.	Upacara Adat Kenduri Suro	Upacara kenduri yang dilakukan untuk menyambut bulan Suro/Muharam
16.	Upacara Adat Babad Bumi Mataram	Upacara untuk memperingati berdirinya Kerajaan Mataram di wilayah Kotagede
17.	Upacara Adat Wiwitan	Upacara yang dilakukan ketika memasuki musim panen padi tiba, upacara ini memohon doa kepada Tuhan YME atas limpahan rezeki yang diberikan
18.	Upacara Saparan	Upacara yang dilaksanakan pada bulan Safar (sapar) yang disimbolkan dengan apem

2.3.7 Kesenian

Sebagai Kota Budaya, pembangunan di bidang seni dan budaya di Kota Yogyakarta menjadi hal penting untuk menjaga citra Kota Budaya. Kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan memaknai kehidupan. Kesenian bagi masyarakat Kota Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, simbol, pendidikan, dan hiburan.

Seni-seni yang tumbuh dan berkembang di kota Yogyakarta terdiri atas berbagai jenis, yaitu:

1. Seni Film;
2. Seni Musik Kontemporer;
3. Seni Musik Tradisi;
4. Seni Musik Vokal;
5. Seni Pertunjukan (Umum);
6. Seni Pertunjukan Kethoprak;
7. Seni Pertunjukan Kontemporer;
8. Seni Pertunjukan Tari;
9. Seni Pertunjukan Tari;
10. Seni Pertunjukan Teater;
11. Seni Pertunjukan Tradisi; dan
12. Seni Rupa.

Beragam jenis seni tersebut pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu seni tradisi istana dan kerakyatan. Pembagian ini tidak bisa dilepaskan dari adanya fungsi, nilai dan filosofi yang melingkupinya. Di samping itu, di Kota Yogyakarta berkembang seni kontemporer. Seni pertunjukan kontemporer merupakan ajang pementasan aneka ragam bentuk seni modern yang berkembang dalam masyarakat perkotaan. Dalam prosesnya, seni kontemporer melibatkan banyak teknik dan konsep-konsep seni yang bersifat estetik maupun kultural, khususnya konsep seni modern yang sedang berkembang pada masanya.

2.3.8 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta antara lain:

1. Bappeda
2. Kemantren
3. Kelurahan
4. Lembaga budaya
5. Masyarakat

2.3.9 Mitra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada perangkat daerah lainnya dan lembaga yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
4. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
5. Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta
6. Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta
7. Tim Ahli Cagar Budaya Kota Yogyakarta
8. Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kota Yogyakarta

2.3.10 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Pengelolaan ini dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah DIY, Kasultanan Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta; serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2025 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Kerja sama dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dilaksanakan untuk melestarikan Sumbu Filosofis, terutama di koridor Panggung Krapyak hingga Tugu Pal Putih Jogja. Bentuk kerja sama ini meliputi:

1. Penyelesaian tekanan pembangunan;
2. Penyelesaian tekanan lingkungan;

3. Penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana;
4. Pengembangan pariwisata berkelanjutan; serta
5. Penyelesaian tekanan masyarakat sekitar.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan

Permasalahan strategis merupakan fondasi penting dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, permasalahan yang diidentifikasi tidak hanya bersumber dari capaian kinerja masa lalu, tetapi juga dari arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat budaya. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dilakukan secara menyeluruh dan terukur dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan.

Salah satu permasalahan dominan yang muncul dalam analisis adalah ancaman terhadap kelestarian warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda. Meskipun capaian partisipasi pelaku budaya dan apresiasi warisan budaya menunjukkan angka yang tinggi, realitas di lapangan memperlihatkan belum meratanya pelibatan masyarakat, minimnya regenerasi pelaku budaya, serta keterbatasan dalam dokumentasi dan penguatan kelembagaan budaya. Kondisi ini diperparah oleh tekanan arus modernisasi dan urbanisasi, yang berisiko menggerus nilai-nilai budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian dan revitalisasi yang sistematis. Permasalahan ini secara langsung mengancam kesinambungan identitas budaya Kota Yogyakarta sebagai kota berbasis kebudayaan dan keistimewaan.

Untuk menjabarkan secara sistematis permasalahan tersebut, dilakukan klasifikasi dalam bentuk tabel yang mengelompokkan antara inti masalah, masalah, dan akar masalah. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam lima tahun ke depan. Setiap akar masalah mencerminkan penyebab mendasar yang mempengaruhi efektivitas upaya pelestarian budaya dan akan menjadi

acuan dalam penyusunan strategi dan program prioritas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ke depan.

Tabel 2.20 Permasalahan terkait Kebudayaan di Kota Yogyakarta

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kelestarian Warisan Budaya Terancam *Capaian partisipasi budaya tinggi (117,54%), tetapi tidak mencerminkan keberlanjutan karena belum terpetakan regenerasinya; arah Renstra juga menekankan lemahnya dokumentasi dan penguatan SDM kebudayaan.*	**Kurangnya Regenerasi Pelaku Budaya**	Belum tersedianya sistem pendataan pelaku budaya berbasis usia, wilayah, dan jenis ekspresi budaya.
		Minimnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pelestarian dan ekspresi budaya lokal.
		Pewarisan nilai budaya masih bersifat informal dan belum terstruktur dalam sistem pembinaan.
	Lemahnya Pelestarian Karya Budaya Takbenda (KBTb)	Terbatasnya dokumentasi, inventarisasi, dan digitalisasi ekspresi budaya lokal secara berkelanjutan.
		Belum semua warisan budaya lokal diusulkan atau ditetapkan sebagai Karya Budaya Takbenda (KBTb).
		Terbatasnya anggaran dan pendampingan kelembagaan terhadap komunitas budaya tradisional.
	Budaya Lokal Rentan terhadap Tekanan Modernisasi	Dominasi budaya populer dan modernisasi belum diimbangi dengan strategi penguatan identitas lokal.
		Kurangnya inovasi penyajian budaya tradisional agar menarik dan relevan bagi generasi muda.
		Belum terintegrasinya narasi kebudayaan ke dalam ruang publik dan sistem pendidikan atau komunikasi massa.

Sumber: Data diolah oleh tenaga ahli

Hasil analisis terhadap kondisi aktual pelestarian budaya di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keberlanjutan warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda. Meskipun indikator partisipasi pelaku budaya menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, yaitu mencapai 117,54% dari target pada tahun 2024, kondisi tersebut tidak secara langsung mencerminkan keberlanjutan yang ideal. Tidak tersedianya data yang memetakan distribusi usia, wilayah, dan keberlanjutan pelaku budaya menyebabkan tingginya partisipasi tersebut tidak dapat dibaca sebagai keberhasilan dalam regenerasi. Ketergantungan pada pelaku budaya senior dan minimnya pelibatan generasi muda mengindikasikan lemahnya sistem pewarisan nilai budaya secara terstruktur.

Di sisi lain pelestarian budaya takbenda juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Masih banyak ekspresi budaya lokal di Kota Yogyakarta yang belum ditetapkan sebagai Karya Budaya Takbenda (KBTb) nasional. Kegiatan dokumentasi budaya masih dilakukan secara terbatas dan tidak menjangkau seluruh kemantren, sehingga banyak potensi ekspresi budaya yang belum terdokumentasikan secara sistematis. Minimnya alokasi anggaran dan lemahnya pendampingan terhadap komunitas budaya tradisional juga memperparah kondisi ini, mengakibatkan sejumlah ekspresi budaya berisiko menghilang karena tidak adanya dukungan kelembagaan yang memadai.

Arus modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi budaya populer turut memperlemah posisi budaya lokal di tengah masyarakat. Meskipun demikian, belum terlihat strategi komunikasi budaya yang terstruktur untuk memperkuat identitas lokal di tengah perubahan zaman. Sementara itu, strategi penguatan regenerasi pelaku budaya baru muncul sebagai arahan kebijakan dan belum dikembangkan dalam bentuk sistematis. Tidak hanya itu, belum meratanya fasilitasi kelompok budaya di seluruh wilayah Kota Yogyakarta turut menunjukkan ketimpangan dalam pengembangan ekosistem budaya.

Dengan mempertimbangkan berbagai indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kelestarian warisan budaya merupakan permasalahan strategis dominan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan antara capaian dengan kondisi ideal, tetapi juga menunjukkan urgensi untuk membangun sistem pelestarian yang adaptif, berbasis data, dan melibatkan generasi muda secara aktif. Oleh karena itu, strategi dan program dalam Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mendatang perlu dirancang untuk menjawab akar-akar masalah tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.

2.4.2 Isu Strategis

Dalam rangka merumuskan arah pembangunan kebudayaan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, identifikasi isu strategis dilakukan melalui pendekatan berlapis yang mengelompokkan isu-isu ke dalam tiga tingkat utama, yaitu isu global, nasional, dan regional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang mampu menjawab tantangan serta

memanfaatkan peluang yang muncul baik dari skala internasional, kebijakan nasional, maupun kondisi faktual lokal di Kota Yogyakarta.

Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025–2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Hasil pengelompokan ini menjadi dasar utama dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan kebudayaan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

1. Isu Strategis Global

Pengelompokan isu strategis global dilakukan untuk menangkap berbagai dinamika internasional yang dapat memengaruhi arah pembangunan kebudayaan di tingkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu global ini bersumber dari perkembangan kebijakan dan tren internasional seperti digitalisasi budaya, transformasi sosial, perubahan iklim, urbanisasi, hingga isu keberlanjutan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun berskala global, implikasinya menjalar hingga ke tatanan lokal, termasuk bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta yang harus meresponsnya melalui kebijakan pelestarian, pemajuan budaya, dan pembinaan masyarakat budaya. Dengan memahami konteks global ini, perumusan kebijakan daerah diharapkan mampu lebih responsif, inovatif, serta selaras dengan praktik dan standar kebudayaan internasional.

Tabel 2.21 Isu Strategis Global Kebudayaan

No	Isu Strategis Global	Implikasi bagi Daerah
1	Dominasi budaya global dan homogenisasi budaya	Menggerus identitas budaya lokal, terutama pada generasi muda
2	Transformasi digital dalam budaya (*digital heritage*, AI, AR/VR)	Menuntut inovasi penyajian dan pelestarian budaya secara digital
3	Urbanisasi dan migrasi memengaruhi keberlangsungan budaya komunitas	Terjadinya disrupsi terhadap nilai budaya komunitas tradisional
4	Perubahan iklim berdampak pada situs budaya fisik dan adat lokal	Mengancam warisan budaya berbasis alam dan tradisi pertanian
5	Kebutuhan integrasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Memerlukan kebijakan yang menjadikan budaya sebagai pilar pembangunan

Sumber : tren internasional, kebijakan multilateral (UNESCO, UNDP), dan arah pembangunan RPJMN 2025-2029

Salah satu isu strategis global yang signifikan adalah dominasi budaya global dan tren homogenisasi budaya yang berpotensi mengikis keberagaman serta identitas budaya lokal. Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang dikenal sebagai Kota Budaya dan Pusat Kebudayaan Jawa, tantangan ini menjadi sangat relevan. Budaya populer global yang disebarluaskan melalui media digital telah menggeser minat generasi muda terhadap warisan budaya lokal. Tanpa intervensi kebijakan yang efektif, kondisi ini berpotensi melemahkan keberlanjutan ekspresi budaya tradisional serta menurunkan daya tarik budaya lokal sebagai aset pembangunan kota.

Selain itu, transformasi digital dalam dunia kebudayaan membawa tantangan sekaligus peluang besar. Kemajuan teknologi seperti digitalisasi arsip budaya, platform virtual pementasan seni, dan pemanfaatan realitas virtual/*augmented reality* dalam pengalaman budaya kini menjadi norma baru dalam pemajuan kebudayaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas budaya, khususnya di tingkat lokal, masih menghadapi keterbatasan dalam akses teknologi, literasi digital, dan pendampingan teknis. Oleh karena itu, isu ini mengharuskan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk memperkuat dukungan terhadap transformasi digital sebagai strategi pelestarian sekaligus pengembangan budaya yang inklusif.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengaruh urbanisasi dan migrasi terhadap eksistensi budaya komunitas. Proses urbanisasi di Kota Yogyakarta yang terus berlangsung telah mendorong perubahan struktur sosial dan tata ruang yang berdampak pada keberlangsungan budaya berbasis komunitas, seperti kampung budaya atau tradisi adat setempat. Ketika ruang hidup komunitas budaya semakin terdesak oleh pembangunan fisik, maka perlu ada strategi penataan wilayah dan kebijakan pelindungan budaya berbasis ruang untuk menjaga keberlanjutan identitas lokal.

Selanjutnya, perubahan iklim turut menjadi isu global yang berdampak terhadap kelestarian warisan budaya, baik fisik maupun takbenda. Situs-situs budaya berbasis alam, tradisi pertanian, serta kalender budaya berbasis musim menjadi rentan terganggu akibat perubahan pola cuaca dan degradasi lingkungan. Dalam hal ini, pelestarian budaya harus mulai mempertimbangkan

pendekatan adaptif berbasis lingkungan hidup, termasuk penguatan kapasitas komunitas budaya dalam mitigasi risiko lingkungan.

Terakhir, terdapat tekanan internasional untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs, khususnya Tujuan 11.4 tentang pelestarian warisan budaya dunia. Bagi Kota Yogyakarta yang memiliki kekayaan budaya tinggi dan status keistimewaan, isu ini menjadi peluang strategis untuk mengarusutamakan budaya dalam seluruh aspek pembangunan kota. Hal ini tidak hanya penting untuk pelestarian nilai-nilai lokal, tetapi juga dapat memperkuat peran budaya dalam membentuk kota yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global.

2. Isu Strategis Nasional

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi secara vertikal, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tidak dapat melepaskan diri dari arah dan kebijakan strategis yang ditetapkan di tingkat nasional. Oleh karena itu, isu strategis nasional menjadi referensi penting dalam menyusun agenda kebudayaan di daerah agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan kebudayaan nasional. Isu-isu ini mencerminkan berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, sekaligus membuka peluang sinergi lintas sektor dan dukungan lintas wilayah. Dengan memperhatikan dinamika nasional ini, perumusan kebijakan kebudayaan daerah diharapkan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pencapaian target pembangunan nasional.

Tabel 2.22 Isu Strategis Kebudayaan Nasional

No.	Isu Strategis Nasional	Relevansi Bagi Kota Yogyakarta
1	Lemahnya regenerasi pelaku budaya	Pelaku budaya muda semakin sedikit, kurangnya kaderisasi di komunitas budaya tradisional
2	Rendahnya pemanfaatan TIK dalam pelestarian budaya	Digitalisasi budaya belum optimal, belum terintegrasi dalam layanan dan basis data kebudayaan
3	Ketimpangan akses terhadap infrastruktur budaya	Wilayah kemantren tertentu belum memiliki fasilitas ruang budaya representatif
4	Belum optimalnya kontribusi budaya terhadap ekonomi kreatif daerah	Potensi industri budaya belum terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kreatif daerah
5	Lemahnya sistem informasi budaya dan partisipasi masyarakat	Basis data budaya tidak lengkap, pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan masih terbatas

Sumber: RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020–2024

Setelah mengidentifikasi isu-isu strategis nasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama adalah lemahnya regenerasi pelaku budaya di tingkat daerah. Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dengan komunitas seni yang aktif, kecenderungan menurunnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya lokal mulai terasa. Banyak kelompok budaya tradisional mengalami kesulitan dalam menarik minat kader baru, sehingga kesinambungan nilai dan praktik budaya berada dalam posisi yang rentan. Kondisi ini perlu direspons melalui kebijakan afirmatif yang mendukung pendidikan budaya, insentif partisipasi pemuda, serta penguatan komunitas berbasis generasi.

Selain itu, tantangan nasional dalam hal rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan kebudayaan di daerah. Di tengah arus digitalisasi, pelestarian dan penyebaran budaya melalui platform digital menjadi kebutuhan mutlak. Namun, belum semua pelaku budaya di Kota Yogyakarta memiliki akses dan kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi tersebut. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta perlu mengambil peran strategis untuk mendorong digitalisasi basis data budaya, pemanfaatan media digital untuk promosi, dan pelatihan literasi digital bagi pelaku budaya.

Ketimpangan infrastruktur budaya di berbagai wilayah turut memperkuat kesenjangan pelayanan kebudayaan. Di Kota Yogyakarta, belum seluruh kemantren memiliki ruang budaya yang representatif, seperti pendapa, sanggar, atau rumah budaya. Hal ini berdampak pada tidak meratanya aktivitas seni budaya dan menurunnya akses masyarakat terhadap ruang ekspresi. Dalam konteks pembangunan berbasis wilayah, perlu dilakukan pemetaan dan pengembangan infrastruktur budaya secara adil dan merata.

Isu kontribusi budaya terhadap ekonomi kreatif juga menjadi sorotan penting. Kendati Kota Yogyakarta memiliki basis komunitas kreatif yang kuat, nilai tambah ekonomi dari sektor budaya belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya pelaku budaya dengan skema pembinaan usaha, pemasaran, dan akses pembiayaan yang memadai. Penguatan ekosistem budaya sebagai bagian dari ekonomi kreatif perlu menjadi fokus kebijakan,

termasuk pengembangan inkubasi budaya, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk berbasis nilai budaya.

Lemahnya sistem informasi budaya dan terbatasnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola budaya yang inklusif dan berbasis bukti. Kurangnya data yang akurat mengenai pelaku budaya, kegiatan, serta potensi wilayah menyebabkan kesulitan dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Penguatan sistem pendataan dan mekanisme partisipatif di tingkat kelurahan dan kemantren dapat menjadi strategi awal untuk menjembatani persoalan ini.

3. Isu Strategis Regional/Lokal

Berbeda dengan isu global dan nasional yang bersifat makro dan lintas sektor, isu strategis regional lebih menekankan pada dinamika internal dan persoalan khas yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan identitas budaya yang kuat dan keragaman komunitas budaya yang tinggi. Isu-isu ini mencerminkan kondisi nyata pelayanan publik dan pembangunan kebudayaan di tingkat lokal, yang bersumber dari kesenjangan antarwilayah, keterbatasan kelembagaan, serta aspirasi langsung dari masyarakat dan pelaku budaya. Oleh karena itu, pemetaan isu strategis regional penting untuk memastikan bahwa perencanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta benar-benar menjawab kebutuhan spesifik wilayah, bukan sekadar mengikuti pola nasional. Isu-isu ini disusun dengan mengacu pada dokumen Ranwal RPJMD Kota Yogyakarta, LKIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, serta penjaringan masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat kota.

Tabel 2.23 Isu Strategis Kebudayaan Regional

No.	Isu Strategis Regional	Relevansi Bagi Kota Yogyakarta
1	Kesenjangan partisipasi masyarakat antarwilayah kemantren	Wilayah dengan komunitas budaya aktif lebih terfasilitasi dibanding wilayah dengan aktivitas budaya minim
2	Terbatasnya infrastruktur budaya berbasis kampung	Sebagian kampung budaya belum memiliki ruang ekspresi atau sarana pelestarian budaya yang memadai
3	Ancaman terhadap kelestarian budaya takbenda	Tradisi lokal dan praktik budaya turun-temurun mulai tergerus oleh modernisasi dan perubahan nilai

No.	Isu Strategis Regional	Relevansi Bagi Kota Yogyakarta
4	Rendahnya kolaborasi antara pelaku budaya dan pemerintah	Banyak komunitas budaya belum terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kebudayaan daerah
5	Lemahnya tata kelola pendataan dan pemetaan potensi budaya	Data pelaku budaya dan aset budaya belum terintegrasi secara digital dan spasial

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, LKIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Salah satu isu strategis utama di tingkat regional adalah **kesenjangan partisipasi masyarakat antarwilayah kemantren** dalam kegiatan kebudayaan. Berdasarkan data capaian kegiatan pada LKIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, memang terdapat peningkatan partisipasi secara kuantitatif. Namun, jika dilihat secara spasial partisipasi tersebut lebih dominan di wilayah dengan komunitas seni dan lembaga budaya yang mapan, seperti di Kemantren Gondokusuman dan Mergangsan. Sementara itu, wilayah seperti Kemantren Umbulharjo dan Tegalrejo tercatat minim aktivitas budaya berbasis masyarakat. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya intervensi berbasis wilayah untuk mendorong kesetaraan akses terhadap kegiatan budaya.

Isu berikutnya adalah **terbatasnya infrastruktur budaya di wilayah.** Meskipun terdapat beberapa kelurahan budaya, masih banyak kampung lain yang belum memiliki fasilitas dasar seperti pendapa, ruang pertunjukan, atau sanggar seni. Ketiadaan infrastruktur ini berimplikasi pada stagnasi kegiatan pelestarian budaya lokal dan terbatasnya ruang ekspresi masyarakat. Pengembangan fasilitas budaya yang merata dan berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak untuk menghidupkan kembali budaya akar rumput.

Isu kebudayaan di tingkat regional yang juga krusial adalah **ancaman terhadap kelestarian budaya takbenda.** Tradisi lisan, upacara adat, dan pengetahuan lokal semakin kehilangan tempatnya di tengah arus globalisasi dan perubahan gaya hidup generasi muda. Beberapa tradisi bahkan sudah tidak dilakukan secara aktif, seperti tradisi "merti desa" di beberapa wilayah yang dahulu rutin diadakan setiap tahun. Minimnya dokumentasi serta belum adanya skema pelindungan yang kuat membuat warisan takbenda rentan punah. Oleh karena itu, dibutuhkan program pelestarian yang melibatkan

pendokumentasian, revitalisasi, dan regenerasi pelaku budaya takbenda secara sistematis.

Selanjutnya**, rendahnya kolaborasi antara pelaku budaya dan pemerintah daerah** menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola budaya yang partisipatif. Meskipun terdapat forum komunikasi budaya, keterlibatan komunitas seni dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program masih terbatas. Hal ini menghambat terbentuknya sinergi yang solid antara pemerintah dan pelaku budaya, serta berisiko menjadikan kebijakan bersifat *top-down* dan tidak responsif terhadap kebutuhan komunitas. Mendorong mekanisme dialog dua arah dan kolaborasi programatik perlu menjadi strategi utama dalam penguatan ekosistem budaya lokal.

Terakhir, **lemahnya sistem pendataan dan pemetaan potensi budaya** menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Hingga tahun 2024, basis data pelaku budaya, lembaga budaya, dan aset budaya masih tersebar di berbagai format dan belum terintegrasi secara digital. Pendataan spasial berbasis wilayah kemantren juga belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, identifikasi kebutuhan, perencanaan program, dan evaluasi capaian kebudayaan sulit dilakukan secara akurat. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta perlu segera mengembangkan sistem informasi budaya berbasis spasial dan partisipatif yang dapat menjadi fondasi kebijakan jangka menengah dan panjang.

2.5 Analisis terhadap Renstra K/L

Kementerian/lembaga yang memiliki hubungan dengan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah Kementerian Kebudayaan. Hal ini karena Kementerian Kebudayaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang hampir mirip dengan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta yaitu memiliki fokus yang sama pada bidang kebudayaan. Dalam Struktur Organisasi Kementerian Kebudayaan, urusan kebudayaan berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan**,** dan Pembinaan Kebudayaan.

Visi Kementerian Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan Misi meliputi :

1. melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia;
2. mengembangkan kebudayaan dalam berbagai bidang yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi;
3. memajukan budaya yang mendukung keberagaman untuk memperkuat persatuan bangsa;
4. mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional;
5. mengukuhkan dan memanfaatkan budaya sebagai soft power Indonesia.

Dengan tujuan yang dicanangkan sebagai berikut.

1. Peningkatan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam Pembangunan.
2. Penguatan tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan juga relevan dengan kondisi yang dihadapi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Permasalahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2.6 Analisis terhadap Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta harus selaras dengan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY. Hal ini dikarenakan koordinator penyelenggaraan Dana Keistimewaan khususnya Urusan Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

Berdasarkan rumusan RPJPD 2025–2045, budaya memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY. Sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2025–2045 yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan adalah **"Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan"**. Sementara itu, dalam RPJMD DIY 2022–2027 dijelaskan bahwa budaya menjadi ruh

atau spirit bagi segala gerak kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY.

Permasalahan kebudayaan terdegradasinya Nilai Budaya Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta yang lekat dengan sebutan "Kota Budaya" kaya akan nilai-nilai adiluhung yang dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Berbagai nilai ini dikategorikan dalam tiga derajat nilai, yaitu nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai tujuan. Nilai fundamental merupakan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam, seperti *hamemayu hayuning bawono*. Sementara, nilai tujuan merupakan tujuan ideal masyarakat Yogyakarta melalui suatu nilai instrumental yang melandasi pencapaian tujuan tersebut. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, akses keterbukaan informasi, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya.

Dalam perkembangannya, ancaman terhadap nilai-nilai budaya semakin nyata, pengaruh budaya luar menjadi lebih intensif. Kondisi ini menjadikan masyarakat terbagi menjadi beberapa tipe. Ada sebagian dari mereka yang mampu beradaptasi dan mengadopsi sebagian nilai yang dipandang baik, tetapi ada juga dari mereka yang tidak mampu maupun mengolah esensi nilai yang ada di dalamnya. Selain itu, terdapat juga kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan.

Isu strategis DIY adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan. Hasil pembangunan seyogyanya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik mereka yang tinggal di kota maupun di desa. Pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai upaya yang dilakukan. Berkaitan kondisi yang telah dijelaskan tersebut, diperlukan upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya yang diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat sekaligus meneguhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang tecermin pada kehidupan masyarakat. Penguatan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat ini pula yang diupayakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

2.7 Analisis terhadap RTRW

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta 2025–2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021–2041. Telaah RTRW tahun 2021–2041 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ditinjau dari implikasi RTRW.

Berdasarkan Perda tersebut, salah satu kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengembangan kawasan strategis kota adalah pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB). Sementara itu, pelestarian dan pengembangan di KCB menjadi salah satu bentuk kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai KCB inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam kinerja pelayanan.

2.8 Analisis terhadap KLHS

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara-negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti, bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan ketika menyusun kebijakan, program dan kegiatan juga mempertimbangkan aspek KLHS.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2025 tentang Penetapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, terdapat tujuh isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis di Kota Yogyakarta tahun 2025–2029. Ketujuh isu tersebut sebagai berikut.

1. Pengelolaan Persampahan dan limbah belum optimal.
2. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik.
4. Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi.
5. Kawasan dan Permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi.
6. Belum optimalnya transportasi publik.
7. Penegakan hukum terkait keamanan, ketenteraman, dan ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD, terutama terkait isu Pembangunan Berkelanjutan. Berikut faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

1. Upaya menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya.
2. Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti yang masih kurang.
3. Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis.
4. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi sebagai aset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah.
5. Masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif.
6. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif.
7. Kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana edukasi.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

1. Meningkatnya kesadaran di antara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengembangan kebudayaan.
2. Dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, LSM bidang pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai pendukung upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya.

3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan.
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya.
5. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya.

2.9 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.9.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan meliputi:

1. Pelestarian Warisan Budaya belum Optimal
2. Perkembangan Arus Globalisasi Menyebabkan Menurunnya Minat Generasi Muda terhadap Budaya Lokal
3. Regenerasi di Bidang Kebudayaan belum Optimal
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kebudayaan masih Minim
5. Keberadaan Ruang Ekspresi dan Interaksi Budaya masih Terbatas
6. Tata Kelola Lembaga Budaya belum Optimal

Secara rinci permasalahan per objek kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Warisan Budaya

a. Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya yang masih rendah.
b. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap cagar budaya dan / atau warisan budaya.
c. Sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan / atau warisan budaya.
d. Sebagian besar kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta berada di kawasan urban sehingga terancam eksistensinya dan kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
e. Tidak seluruh masyarakat yang tinggal di KCB memiliki pemahaman dan kebanggaan atas penetapan wilayah tinggalnya sebagai KCB sehingga kurang mampu mempertahankan citra kawasan.

f. Terbatasnya keterlibatan tenaga ahli baik peneliti dan perekayasa dalam proses pengelolaan BCB.

2. Sejarah dan Permuseuman

a. Citra museum di masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti gudang penyimpanan barang antik.

b. Koordinasi dan kerja sama antar lembaga permuseuman di tingkat Yogyakarta belum terbentuk secara mapan.

c. Masyarakat belum bisa memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.

d. Keterbatasan kemampuan SDM yang tersedia sehingga berpengaruh pada pengelolaan museum yang kurang profesional, *display* koleksi yang kurang tertata, kandungan informasi koleksi yang masih minim.

e. Lembaga kerja sama antar museum di tingkat lokal dan nasional belum dilakukan secara maksimal untuk mendukung pengembangan museum.

f. Fasilitas museum yang secara umum hanya untuk mendukung upaya konservasi, dan masih sangat terbatas fasilitas bagi penunjang edukasi dan rekreasi.

g. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari.

h. minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penerapan Bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami aturan dan norma dalam penerapan bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi.

3. Adat Tradisi lembaga Budaya dan Seni

a. Tata nilai adiluhung keyogyakartaan khususnya dan kejawaan pada umumnya kurang tersosialisasikan secara luas sehingga seringkali hanya diketahui, dihayati, dan dipraktekkan oleh anggota masyarakat yang sangat terbatas. Nilai- nilai luhur yang diideal sebagai jiwa masyarakat seringkali hanya sebatas kredo dan penjabaran sebagai pedoman hidup masyarakat masih sangat samar.

b. Pengetahuan tentang makna nilai ideal budaya Yogyakarta sangat terbatas hanya di lingkungan tertentu saja (lingkungan kraton, pemerhati budaya, dan akademisi). Sehingga pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung

memudarkan nilai-nilai tata krama yang selama ini sangat dibanggakan oleh masyarakat.

c. Kecenderungan pada *setback* (nostalgia) tanpa memahami nilai dan makna pelaksanaan upacara adat dan tradisi.

d. Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan daripada tuntunan).

e. Lemahnya pengelolaan kegiatan adat dan tradisi yang bersifat komunal dalam skala lokal sehingga belum mampu mendatangkan manfaat ekonomi.

f. Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudarkan nilai-nilai tata krama dan menggeser norma-norma yang selama ini dianut dan dijalankan oleh masyarakat.

g. Kurangnya dukungan ruang/fasilitas yang representatif untuk mengakomodasi kebutuhan proses edukatif dan kreatif.

h. Kegiatan seni di Kota Yogyakarta belum dipahami sepenuhnya sebagai aset promosi Yogyakarta yang berpotensi tinggi secara ekonomis maupun pencitraan Kota Yogyakarta.

i. Kurangnya jejaring pengembangan seni antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

j. Masih-masing pelaku/lembaga kesenian masih berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinasi antarlembaga.

k. Kurangnya penghargaan terhadap seniman dan hasil karyanya baik dari secara ekonomis maupun legalitas (hak cipta).

l. Persaingan yang tidak sehat (perang harga) diantara pelaku seni dan film.

m. Program Rintisan Kelurahan Budaya sebagai salah satu upaya nyata dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk melestarikan berbagai aset budaya yang dimiliki di wilayahnya, belum tersosialisasikan dengan baik.

n. Organisasi Rintisan Kelurahan Budaya belum optimal dalam menggerakkan pengembangan berbagai aset budaya di tingkat kelurahan dan meningkatkan apresiasi anggota masyarakat terhadap pengembangan budaya di wilayahnya.

o. Pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya bagi sebagian besar warga masyarakat masih sekadar wacana dan belum dihayati yang terlihat dari kondisiumum kehidupan di lingkungan Rintisan Kelurahan Budaya tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan pada umumnya.

2.9.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan bidang kebudayaan dan telaah berbagai kondisi seperti tersebut di atas, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Lokal sebagai Potensi Pengembangan Pariwisata Daerah.
2. Pemanfaatan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai Ruang Interaksi, Ekspresi, Kolaborasi Karya Seni Budaya, dan Jejaring untuk Memberikan Kemanfaatan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event Budaya sebagai Media Promosi dan Publikasi Budaya Lokal.
5. Penguatan Citra Kawasan Cagar Budaya untuk Mendukung *Branding* "Kota Budaya".
6. Regenerasi di bidang Kebudayaan sebagai Media Pembentukan Karakter dan Penanaman Budi Pekerti.

Tabel 2.24 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan menjadi destinasi wisata	Pelestarian Budaya belum Optimal	Meningkatnya kesadaran di antara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengembangan kebudayaan.	Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Kesejahteraan, Pengangguran	1. Pelestarian dan Pengelolaan Budaya Lokal sebagai Potensi Pengembangan Pariwisata Daerah.
	Perkembangan Arus Globalisasi Menyebabkan Menurunnya Minat Generasi Muda terhadap Budaya Lokal	Dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, LSM bidang pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai pendukung upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya.	Teknologi Informasi			2. Pemanfaatan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai Ruang Interaksi, Ekspresi, Kolaborasi Karya Seni Budaya, dan Jejaring untuk Memberikan Kemanfaatan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kebudayaan masih Minim	Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya				3. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Keberadaan Ruang Ekspresi dan Interaksi Budaya masih Terbatas					4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event Budaya sebagai Media Promosi dan Publikasi Budaya Lokal.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tata Kelola Lembaga Budaya belum Optimal	Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan.				5. Penguatan Citra Kawasan Cagar Budaya untuk Mendukung *Branding* "Kota Budaya".
	Regenerasi di Bidang Kebudayaan belum Optimal	Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya.				6. Regenerasi di bidang Kebudayaan sebagai Media Pembentukan Karakter dan Penanaman Budi Pekerti.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Tujuan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk 5 Tahun yang akan datang dengan Visi: **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"**, Visi tersebut dijalankan melalui Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan **Pembangunan Manusia** yang produktif, Berkualitan dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan.
2. Mewujudkan **Infrastruktur Perkotaan** yang Berkualitas dan **Lingkungan Hidup** yang Lestari.
3. Mewujudkan **Kemandirian Ekonomi** dan **Keadilan Sosial**, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
4. Mewujudkan **Tata Pemerintahan** Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.
5. Memperkokoh Perjuangan Mencapai **Tujuan Keisitimewaan** DIY**.**

Misi tersebut ditempuh melalui Program Prioritas yang mengacu pada delapan program strategis Wali Kota Terpilih. Kedelapan Program Strategis tersebut sebagai berikut.

1. Meningkatkan derajat pendidikaan warga, melalui program uggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana;
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian; dan
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda.
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat;

b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan

c. Satu Kampung Satu Bidan.

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:

a. Bela Beli Produk Warga;

b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan

c. Modernisasi Pasar Rakyat.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:

a. Revitalisasi Kampung Wisata;

b. Ekonomi Olahraga; dan

c. Penguatan akses pendanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program utama:

a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.

b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; serta

c. Perlindungan Hukum bagi Warga.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:

a. Bapak Asuh Keluarga Miskin;

b. Kampung Layak Huni; serta

c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan.

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:

a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan;

b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan;

d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan; serta

e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:

a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah;

b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan; serta

c. Jogja Tangguh Bencana.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menetapkan tujuan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yaitu "**Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta**" dengan Indikator Kinerja diukur berdasarkan "Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan". Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan beberapa komponen berikut.

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni budaya.
2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat atau peninggalan sejarah atau warisan budaya bersifat kebendaan.
3. Persentase Keaktifan Sanggar atau Lembaga Budaya.
4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni budaya.
5. Persentase Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan.
6. Persentase objek kebudayaan yang terkelola.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis, yaitu "**Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta**" dengan indikator kinerja "Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan". Sasaran strategis ini dihitung berdasarkan beberapa komponen berikut.

a. Tingkat pengenalan masyarakat terhadap warisan budaya.

b. Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra sejarah dan permuseuman.

c. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap adat tradisi, lembaga budaya, dan seni.

Sementara itu, Sasaran Strategis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu "**Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha***

***Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif**" dengan indikator kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan". Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dilakukan oleh Inspektorat dengan berpedoman pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan peraturan tersebut, penilaian RB meliputi delapan parameter berikut.

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan
b. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kebudayaan
c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan
d. Indeks Kepuasan Masyarakat
e. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP
f. IP ASN Dinas Kebudayaan
g. Penilaian Pengawasan arsip internal
h. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

2. Sasaran Program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran strategis tersebut kemudian dirinci ke tingkat sasaran program yang meliputi:

a. Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya (IK: Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi)
b. Meningkatnya Kemandirian Sanggar/Lembaga Budaya (IK: Persentase Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya)
c. Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman (IK: Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman)
d. Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar (IK 1: Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan; IK 2: Jumlah Pengunjung Taman Pintar)
e. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (IK: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya).

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran strategis beserta target pada periode 2025–2029 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal 2. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan	Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta		Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan	39,47%	42,12%	44,93%	47,75%	50,57%	52,38%	
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta	Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan	71,67%	72,01%	72,34%	72,67%	73,01%	73,34%	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (88,286-88,5)	A (88,3-88,6)	A (88,4-88,7)	A (88,5-88,8)	A (88,6-88,9)	A (88,7-89)	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menerapkan strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Melalui strategi ini pengelolaan setiap program kegiatan pembangunan diharapkan lebih fokus dan terarah.

Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 menggunakan *road map*/peta jalan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Publikasi budaya dan jejaring melalui pengembangan kawasan *heritage* untuk memperkuat identitas budaya Kota Yogyakarta	Inter-konektivitas pusat-pusat seni budaya di Kota Yogyakarta dalam mempermudah masyarakat mengakses visual identitas budaya	Sertifikasi pelaku seni budaya untuk meningkatkan standar kualitas event seni budaya di Kota Yogyakarta	Aktivasi bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta untuk memperkuat citra kawasan dan melestarikan nilai-nilai sejarah lokal	Penguatan ekosistem budaya yang berkelanjutan dalam rangka membangun karakter dan identitas budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Penyediaan ruang ekspresi dan konservasi bagi pemajuan kebudayaan untuk ketahanan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Strategi pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan

selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan,

Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 dilakukan dengan:

1. Meningkatkan Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya
2. Meningkatkan Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya
3. Meningkatkan Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah
4. Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan a. Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman b. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya c. Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya d. Pengelolaan Taman Budaya e. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penguatan kebudayaan pada kehidupan dalam mendukung perekonomian Masyarakat	- Meningkatkan Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya - Meningkatkan Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya - Meningkatkan Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah - Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya - Memajukan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat	**Misi 3:** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal **Misi 5:** Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	**Misi 4:** Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Peningkatan Pelayanan BLUD			Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945

3.5 Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada periode 2022–2025, yaitu "Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta" serta Sasaran Strategis, yaitu "Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta" dan "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif". Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan dari OPD-OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dukungan dari OPD-OPD ini juga sekaligus menjadi bentuk sinergitas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang turut berperan penting dalam urusan Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 3.4 Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas Pariwisata	• Promosi dan Publikasi Event Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta • Pengembangan Kampung Wisata • Publikasi dan Penyebarluasan Informasi mengenai Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta

No.	OPD	Dukungan
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang diberikan kepada masyarakat secara terpadu satu pintu.
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Budaya
4.	Dinas Lingkungan Hidup	• Pemberian rekomendasi terkait AMDAL pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya • Pemeliharaan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan di Kawasan Cagar Budaya
5.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengembangan objek WBTb sebagai produk unggulan Kota Yogyakarta
6.	Satpol PP	• Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Cagar Budaya • Penjagaan Keamanan dan Ketertiban di Kawasan Cagar Budaya
7.	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perdagangan	Pengembangan objek WBTb sebagai produk unggulan Kota Yogyakarta
8.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	• Penyebarluasan Informasi mengenai kegiatan pelestarian budaya • Penyebarluasan Informasi mengenai Taman Budaya Embung Giwangan dan Taman Pintar • Publikasi dan Penyebarluasan Informasi mengenai Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta • Pengelolaan data statistik, sektoral, dan geospasial
9.	Dinas Pendidikan	• Pengembangan Kegiatan Pembinaan Kebudayaan • Pengembangan Kegiatan Kesejarahan dan Permuseuman yang Melibatkan Sekolah • Pemanfaatan Taman Pintar sebagai Ruang Edukasi
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Masyarakat Penghayat Kepercayaan
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Pembinaan dan pelestarian kebudayaan bagi anak-anak • Pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang responsif gender
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	• Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Kegiatan Bahasa dan Sastra • Pengelolaan kearsipan
13.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset
16.	Inspektorat	Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
17.	Sekretariat Daerah	• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Pengadaan barang dan jasa • Pengelolaan administrasi Pembangunan • Pelaksanaan kerja sama kegiatan kebudayaan • Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
18.	Kemantren	• Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni budaya di wilayah • Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar • Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Rencana program dan kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan berisi pemaparan secara terperinci bagaimana Perangkat Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu upaya untuk mencapai visi dan misi serta pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggaran urusan pemerintah daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menjalankan urusan pemerintah daerah, yaitu Urusan Kebudayaan. Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki 2 (dua) sasaran yang akan menjadi target dalam jangka lima tahun kedepan. Adapun 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu "**Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta**" dan "**Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif**".

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menjalankan program meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan; serta
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dua program tersebut dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang diampu Dinas Kebudayaaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal untuk Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta				Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan		
	.	1. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta			1. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			1.1 Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya		1.1 Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	1.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			1.1.1 Meningkatnya Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan		1.1.1 Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan		
				1.1.1.1 Terlaksananya Pelestarian Objek Warisan Budaya Benda	1.1.1.1 Jumlah Objek Warisan Budaya Benda yang dikaji dan direkomendasikan sebagai CB	1.1.1 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1.1.1.2 Terlaksananya Pelestarian Objek Warisan Budaya Tak Benda	1.1.1.2 Jumlah Objek Warisan Budaya Tak Benda yang Dicatatkan	1.1.2 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	
				1.1.1.3 Terlaksananya Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta	1.1.1.3 Jumlah Aktivitas Pelayanan dan Pengamanan di Kawasan Cagar Budaya	1.1.3 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya (UPT)	
			1.2 Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman		1.2 Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	1.2 Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman	
			1.2.1 Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman		1.2.1 Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman		
				1.2.1.1 Terlaksananya Pembinaan Kesejarahan	1.2.1.1 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kesejarahan	1.2.1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	
				1.2.1.2 Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Permuseuman	1.2.1.2 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Permuseuman	1.2.2 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1.2.1.3 Terlaksananya Pembinaan Bahasa Jawa dan Kesastraan	1.2.1.3 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra	1.2.3 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			1.3 Meningkatnya Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya		1.3 Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	1.3 Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	
			1.3.1 Meningkatnya Pembinaan Sanggar/lembaga Budaya		1.3.1 Jumlah Sanggar/ lembaga Budaya Ber NIKeb yang Dibina		
				1.3.1.1 Terlaksananya Pembinaan Rintisan Kelurahan Budaya	1.3.1.1 Jumlah sanggar yang ber-NIKeb di Rintisan Kelurahan Budaya	1.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	
						1.3.2 Penghargaan Seniman dan Budayawan	
				1.3.1.2 Terlaksananya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya Ber-NIKeb	1.3.1.2 Jumlah Sanggar atau Lembaga Budaya yang Difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	1.3.3 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	
						1.3.4 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	
						1.3.5 Festival Kebudayaan Yogyakarta	
						1.3.6 Gelar Budaya Jogja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1.3.7 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	
						1.3.8 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	
						1.3.9 Publikasi Seni dan Budaya Daerah	
			1.4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya		1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	1.4 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			1.4.1 Meningkatnya Pelayanan di Kawasan Cagar Budaya		1.4.1 Jumlah Layanan di Kawasan Cagar Budaya		
				1.4.1.1 Terlaksananya Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta	1.4.1.1 Jumlah Operasional Pemeliharaan di Kawasan Cagar Budaya	1.4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	
			1.5 Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar		1.5 Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	1.5 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota	
			1.5.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Event atau Kegiatan Budaya		1.5.1 Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			di Taman Budaya Embung Giwangan		Taman Budaya Embung Giwangan		
				1.5.1.1 Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya Embung Giwangan	1.5.1.1 Jumlah Ruang Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan yang Dikelola	1.5.1. Pengelolaan Taman Budaya	
		2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif			2. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)		2.1.a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) 2.1.b Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) 2.1.c Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan,		2.1.1.a Persentase ketepatan penyusunan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)		perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) 2.1.1.b Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)		
				2.1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tepat waktu	2.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				2.1.1.2 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD yang Koordinatif dan Tepat Waktu	2.1.1.2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
				2.1.1.3 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang koordinatif dan tepat waktu	2.1.1.3 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2.1.1.4 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	2.1.1.4 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.1.2 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				2.1.2.1 Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	2.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				2.1.2.2 Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				2.1.2.3 Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.1.2.3 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				2.1.2.4 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang koordinatif dan tepat waktu	2.1.2.4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				2.1.2.5 Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tepat waktu	2.1.2.5 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.2.5 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2.1.2.6 Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang koordinatif dan tepat waktu	2.1.2.6 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				2.1.2.7 Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tepat waktu	2.1.2.7 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			2.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.1.2 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	2.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				2.1.2.8 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara efektif dan efisien	2.1.2.8 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2.1.2.9 Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal	2.1.2.9 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				2.1.2.10 Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara optimal	2.1.2.10 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.3.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum		2.1.3 Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				2.1.3.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara optimal	2.1.3.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				2.1.3.2 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan secara optimal	2.1.3.2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.4.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				2.1.3.3 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan secara optimal	2.1.3.3 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				2.1.3.4 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal	2.1.3.4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2.4.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kantor yang Disediakan		
				2.1.3.5 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara efektif dan efisien	2.1.3.5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum		2.1.4 Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				2.1.4.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor secara optimal	2.1.4.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				2.1.4.2 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan secara optimal	2.1.4.2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.5.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				2.1.4.3 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan secara optimal	2.1.4.3 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				2.1.4.4 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal	2.1.4.4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.5.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				2.1.4.5 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.1.4.5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD secara efektif dan efisien	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD	
			2.1.5 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)		2.1.5 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				2.1.5.1 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.1.5.1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.5.6 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			2.1.6 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa		2.1.6 Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				2.1.6.1 Tersedianya Jasa Surat Menyurat secara optimal	2.1.6.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				2.1.6.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal	2.1.6.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				2.1.6.3 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal	2.1.6.3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2.2 Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar		2.2 Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	2.7 Peningkatan Pelayanan BLUD	
			2.2.1 Meningkatnya Pelayanan di Taman Pintar		2.2.1 Jumlah Program layanan di Taman Pintar		
				2.2.1.1 Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Taman Pintar	2.2.1.1 Jumlah Kerja Sama yang Terjalin dengan Taman Pintar	2.7.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				2.2.1.2 Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Taman Pintar	2.2.1.2 Jumlah Alat Peraga di Taman Pintar yang Dikelola		

4.2 Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program kegiatan harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan. Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program kerja yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah.

Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				63.163.522.096,37		87.128.773.869		100.700.197.577		101.592.491.467		102.529.400.053		103.513.154.066		
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.860.153.096,37		28.600.438.869		28.100.438.869		28.100.438.869		28.100.438.869		28.100.438.869		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Skor)	4,424	4,5	10.824.991.122	4,5	9.883.139.119	4,55	9.883.139.119	4,6	9.883.139.119	4,65	9.883.139.119	4,65	9.883.139.119	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha	
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.069.500		57.069.500		57.069.500		57.069.500		57.069.500		57.069.500		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelpaoran Kinerha Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	75.069.500	4	57.069.500	4	57.069.500	4	57.069.500	4	57.069.500	4	57.069.500		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				43.540.000		25.540.000		25.540.000		25.540.000		25.540.000		25.540.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	43.540.000	1	25.540.000	1	25.540.000	1	25.540.000	1	25.540.000	1	25.540.000		
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.719.800		7.719.800		7.719.800		7.719.800		7.719.800		7.719.800		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	7.719.800	2	7.719.800	2	7.719.800	2	7.719.800	2	7.719.800	2	7.719.800		
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.159.900		19.159.900		19.159.900		19.159.900		19.159.900		19.159.900		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	19.159.900	4	19.159.900	4	19.159.900	4	19.159.900	4	19.159.900	4	19.159.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.649.800		4.649.800		4.649.800		4.649.800		4.649.800		4.649.800		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4.649.800	4	4.649.800	4	4.649.800	4	4.649.800	4	4.649.800	4	4.649.800		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.649.057.717		8.761.148.714		8.761.148.714		8.761.148.714		8.761.148.714		8.761.148.714		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	9.649.057.717	12	8.761.148.714	12	8.761.148.714	12	8.761.148.714	12	8.761.148.714	12	8.761.148.714		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12											
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67		67		67		67		67		67			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.027.082.717		8.739.773.714		8.739.773.714		8.739.773.714		8.739.773.714		8.739.773.714		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67	9.027.082.717	67	8.739.773.714	67	8.739.773.714	67	8.739.773.714	67	8.739.773.714	67	8.739.773.714		
2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.431.000		3.431.000		3.431.000		3.431.000		3.431.000		3.431.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000		
2.22.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				5.224.000		5.224.000		5.224.000		5.224.000		5.224.000		5.224.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.224.000	12	5.224.000		5.224.000		5.224.000		5.224.000		5.224.000		
2.22.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.860.000		3.860.000		3.860.000		3.860.000		3.860.000		3.860.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	3.860.000	12	3.860.000	12	3.860.000	12	3.860.000	12	3.860.000	12	3.860.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.375.000		2.375.000		2.375.000		2.375.000		2.375.000		2.375.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.375.000	1	2.375.000	1	2.375.000	1	2.375.000	1	2.375.000	1	2.375.000		
2.22.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.186.000		2.186.000		2.186.000		2.186.000		2.186.000		2.186.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2.186.000	2	2.186.000	2	2.186.000	2	2.186.000	2	2.186.000	2	2.186.000		
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.386.000		3.386.000		3.386.000		3.386.000		3.386.000		3.386.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	3.386.000	12	3.386.000	12	3.386.000	12	3.386.000	12	3.386.000	12	3.386.000		
2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				913.000		913.000		913.000		913.000		913.000		913.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	913.000	1	913.000	1	913.000	1	913.000	1	913.000	1	913.000		
2.22.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0		
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0		
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				425.418.005		387.318.505		387.318.505		387.318.505		387.318.505		387.318.505		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	390.628.405	6	352.773.305	6	352.773.305	6	352.773.305	6	352.773.305	6	352.773.305		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		2			
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				6.022.425		6.021.925		6.021.925		6.021.925		6.021.925		6.021.925		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.022.425	1	6.021.925	1	6.021.925	1	6.021.925	1	6.021.925	1	6.021.925		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				161.663.580		135.936.380		135.936.380		135.936.380		135.936.380		135.936.380		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	161.663.580	6	135.936.380	6	135.936.380	6	135.936.380	6	135.936.380	6	135.936.380		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.297.400		46.420.000		46.420.000		46.420.000		46.420.000		46.420.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	53.297.400	2	46.420.000	2	46.420.000	2	46.420.000	2	46.420.000	2	46.420.000		
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168.445.000		163.195.000		163.195.000		163.195.000		163.195.000		163.195.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	168.445.000	1	163.195.000	1	163.195.000	1	163.195.000	1	163.195.000	1	163.195.000		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		0		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.786.287.109		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	370.034.000	1	400.045.000	1	400.045.000	1	400.045.000	1	400.045.000	1	400.045.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				363.734.000		393.745.000		393.745.000		393.745.000		393.745.000		393.745.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	363.734.000	1	393.745.000	1	393.745.000	1	393.745.000	1	393.745.000	1	393.745.000		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				502.855.350		474.941.150		474.941.150		474.941.150		474.941.150		474.941.150		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	340.201.500	6	312.102.600	6	312.102.600	6	312.102.600	6	312.102.600	6	312.102.600		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13		13			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				187.425.500		32.740.000		32.740.000		32.740.000		32.740.000		32.740.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	187.425.500	1	32.740.000	1	32.740.000	1	32.740.000	1	32.740.000	1	32.740.000		
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		148.559.000		148.559.000		148.559.000		148.559.000		148.559.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	0	13	148.559.000	13	148.559.000	13	148.559.000	13	148.559.000	13	148.559.000		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.576.000		30.803.600		30.803.600		30.803.600		30.803.600		30.803.600		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	31.576.000	6	30.803.600	6	30.803.600	6	30.803.600	6	30.803.600	6	30.803.600		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				121.200.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	121.200.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Nilai)	A	A	1.613.696.559	A	1.717.299.750	A	1.717.299.750	A	1.717.299.750	A	1.717.299.750	A	1.717.299.750		
	Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Skor)	4,424	4,5		4,5		4,55		4,6		4,65		4,65			
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.254.180.005		387.318.505		387.318.505		387.318.505		387.318.505		387.318.505		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	34.789.600	7	34.545.200	7	34.545.200	7	34.545.200	7	34.545.200	7	34.545.200		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1.715.500		2.501.600		2.501.600		2.501.600		2.501.600		2.501.600		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.715.500	1	2.501.600	1	2.501.600	1	2.501.600	1	2.501.600	1	2.501.600		
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.656.850		9.386.350		9.386.350		9.386.350		9.386.350		9.386.350		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	10.656.850	7	9.386.350	7	9.386.350	7	9.386.350	7	9.386.350	7	9.386.350		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.777.250		9.777.250		9.777.250		9.777.250		9.777.250		9.777.250		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	9.777.250	1	9.777.250	1	9.777.250	1	9.777.250	1	9.777.250	1	9.777.250		
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				780.000		780.000		780.000		780.000		780.000		780.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	780.000	1	780.000	1	780.000	1	780.000	1	780.000	1	780.000		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.860.000		12.100.000		12.100.000		12.100.000		12.100.000		12.100.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	11.860.000	1	12.100.000	1	12.100.000	1	12.100.000	1	12.100.000	1	12.100.000		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.786.287.109		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		1.919.961.000		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.416.253.109	1	1.519.916.000	1	1.519.916.000	1	1.519.916.000	1	1.519.916.000	1	1.519.916.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.500.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.413.753.109		1.516.816.000		1.516.816.000		1.516.816.000		1.516.816.000		1.516.816.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.413.753.109	1	1.516.816.000	1	1.516.816.000	1	1.516.816.000	1	1.516.816.000	1	1.516.816.000		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				502.855.350		474.941.150		474.941.150		474.941.150		474.941.150		474.941.150		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	162.653.850	16	162.838.550	16	162.838.550	16	162.838.550	16	162.838.550	16	162.838.550		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4		4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.853.750												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	45.853.750												
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.550.100		138.178.550		138.178.550		138.178.550		138.178.550		138.178.550		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	108.550.100	4	138.178.550	4	138.178.550	4	138.178.550	4	138.178.550	4	138.178.550		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.250.000		12.160.000		12.160.000		12.160.000		12.160.000		12.160.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	8.250.000	16	12.160.000	16	12.160.000	16	12.160.000	16	12.160.000	16	12.160.000		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		
Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar (Orang)	738.683	755.000	18.421.465.415,37	755.000	17.000.000.000	760.000	16.500.000.000	765.000	16.500.000.000	770.000	16.500.000.000	775.000	16.500.000.000		
2.22.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				18.421.465.415,37		17.000.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		
Meningkatnya Pelayanan di Taman Pintar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	18.421.465.415,37	1	17.000.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000		
2.22.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.421.465.415,37		17.000.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	18.421.465.415,37	1	17.000.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA				32.303.369.000		58.528.335.000		72.599.758.708		73.492.052.598		74.428.961.184		75.412.715.197		
Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi (Persentase)	0	59,85	15.587.440.000	59,85	14.430.240.000	65,09	17.845.877.808	70,03	18.738.171.698	73,35	19.675.080.284	75,99	20.658.834.297	2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha	
2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				25.180.240.000		25.180.240.000		30.264.388.808		31.156.682.698		32.093.591.284		33.077.345.297		
Meningkatnya Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	90	90	15.587.440.000	90	14.430.240.000	90	17.845.877.808	90	18.738.171.698	90	19.675.080.284	90	20.658.834.297		
	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	1	1		1		1		1		1		1			
2.22.08.5.02.0001 - Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya				9.090.440.000		10.750.000.000		13.294.525.000		13.959.251.250		14.657.213.813		15.390.074.503		
Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	1	1	9.090.440.000	1	10.750.000.000	1	13.294.525.000	1	13.959.251.250	1	14.657.213.813	1	15.390.074.503		
2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				6.497.000.000		3.680.240.000		4.551.352.808		4.778.920.448		5.017.866.471		5.268.759.794		
Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	90	90	6.497.000.000	90	3.680.240.000	90	4.551.352.808	90	4.778.920.448	90	5.017.866.471	90	5.268.759.794		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keaktifan RKB dan Sanggar/ Lembaga Budaya	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya (Persentase)	31.71	42.79	13.056.307.000	42.79	16.621.095.000	46.45	20.344.282.900	50.12	20.344.282.900	53.79	20.344.282.900	57.46	20.344.282.900		
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				13.056.307.000		16.621.095.000		20.344.282.900		20.344.282.900		20.344.282.900		20.344.282.900		
Meningkatnya Pembinaan Sanggar / Lembaga Budaya	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)	2	2	13.056.307.000	2	16.621.095.000	2	20.344.282.900	2	20.344.282.900	2	20.344.282.900	2	20.344.282.900		
	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	1	3		3		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	3	3		3		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	6	7		7		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	2	2		2		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)	4	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	7	6		6		7		7		7		7			
	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	0	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)	5	5		5		6		6		6		6			
2.22.08.5.07.0001 - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				1.000.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		
Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)	4	5	1.000.000.000	5	2.450.000.000	5	2.450.000.000	5	2.450.000.000	5	2.450.000.000	5	2.450.000.000		
2.22.08.5.07.0002 - Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				390.400.000		600.000.000		722.854.000		722.854.000		722.854.000		722.854.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)	2	2	390.400.000	2	600.000.000	2	722.854.000	2	722.854.000	2	722.854.000	2	722.854.000		
2.22.08.5.07.0003 - Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi				340.000.000		770.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		
Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	2	2	346.000.000	2	770.000.000	3	1.900.000.000	3	1.900.000.000	3	1.900.000.000	3	1.900.000.000		
2.22.08.5.07.0004 - Penghargaan Seniman dan Budayawan				350.000.000		250.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	0	10	350.000.000	10	250.000.000	10	340.000.000	10	340.000.000	10	340.000.000	10	340.000.000		
2.22.08.5.07.0005 - Festival Kebudayaan Yogyakarta				498.000.000		500.000.000		802.000.000		802.000.000		802.000.000		802.000.000		
Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	3	3	498.000.000	3	500.000.000	1	802.000.000	1	802.000.000	1	802.000.000	1	802.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				4.519.425.000		6.000.000.000		6.764.664.000		6.764.664.000		6.764.664.000		6.764.664.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	6	7	4.519.425.000	7	6.000.000.000	6	6.764.664.000	6	6.764.664.000	6	6.764.664.000	6	6.764.664.000		
2.22.08.5.07.0007 - Publikasi Seni dan Budaya Daerah				446.000.000		660.000.000		637.720.000		637.720.000		637.720.000		637.720.000		
Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	1	3	446.000.000	3	660.000.000	2	637.720.000	2	637.720.000	2	637.720.000	2	637.720.000		
2.22.08.5.07.0008 - Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi				474.600.000		1.082.045.000		1.417.100.900		1.417.100.900		1.417.100.900		1.417.100.900		
Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)	5	5	474.600.000	5	1.082.045.000	6	1.417.100.900	6	1.417.100.900	6	1.417.100.900	6	1.417.100.900		
2.22.08.5.07.0009 - Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1.100.000.000		1.709.050.000		3.059.944.000		3.059.944.000		3.059.944.000		3.059.944.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	7	6	1.100.000.000	6	1.709.050.000	7	3.059.944.000	7	3.059.944.000	7	3.059.944.000	7	3.059.944.000		
2.22.08.5.07.0010 - Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				1.550.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		
Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni (Laporan)	2	2	1.550.000.000	2	2.000.000.000	2	2.250.000.000	2	2.250.000.000	2	2.250.000.000	2	2.250.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (Persentase)	83,93	84,25	20.700.000.000	84,25	20.700.000.000	84,5	24.423.878.000	84,75	24.423.878.000	85	24.423.878.000	85,25	24.423.878.000		
2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				25.180.240.000		25.180.240.000		30.264.388.808		31.156.682.698		32.093.591.284		33.077.345.297		
Meningkatnya Pelayanan di Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	1	1	9.090.440.000	1	10.750.000.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000		
2.22.08.5.02.0001 - Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya				9.090.440.000		10.750.000.000		12.418.511.000		12.418.511.000		12.418.511.000		12.418.511.000		
Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	1	1	9.090.440.000	1	10.750.000.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000	1	12.418.511.000		
2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Kelistimewaan Urusan Kebudayaan				6.497.000.000		9.950.000.000		12.005.367.000		12.005.367.000		12.005.367.000		12.005.367.000		
Meningkatnya Pelayanan di Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	7	7	6.497.000.000	7	9.950.000.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000		
2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				6.497.000.000		9.950.000.000		12.005.367.000		12.005.367.000		12.005.367.000		12.005.367.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	7	7	6.497.000.000	7	9.950.000.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000	7	12.005.367.000		
Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman (Persentase)	82,52	83,27	2.382.082.000	83,27	3.677.000.000	83,77	4.605.870.000	84,27	4.605.870.000	84,77	4.605.870.000	85,27	4.605.870.000		
2.22.08.5.01 - Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman				2.382.082.000		3.677.000.000		4.605.870.000		4.605.870.000		4.605.870.000		4.605.870.000		
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)	19	19	2.382.082.000	19	3.677.000.000	19	4.605.870.000	19	4.605.870.000	19	4.605.870.000	19	4.605.870.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.08.5.01.0001 - Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				897.382.000		1.240.000.000		1.280.254.000		1.280.254.000		1.280.254.000		1.280.254.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Dokumen)	4	4	897.382.000	4	1.240.000.000	4	1.280.254.000	4	1.280.254.000	4	1.280.254.000	4	1.280.254.000		
2.22.08.5.01.0002 - Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				984.700.000		1.670.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (Laporan)	4	4	984.700.000	4	1.670.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000		
2.22.08.5.01.0003 - Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				500.000.000		767.000.000		1.325.616.000		1.325.616.000		1.325.616.000		1.325.616.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)	19	19	500.000.000	19	767.000.000	19	1.325.616.000	19	1.325.616.000	19	1.325.616.000	19	1.325.616.000		
Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan (Kegiatan)	0	15	1.100.000.000	15	3.100.000.000	20	5.379.850.000	25	5.379.850.000	30	5.379.850.000	35	5.379.850.000		
2.22.08.5.03 - Pengelolaan Taman Budaya				1.100.000.000		3.100.000.000		5.379.850.000		5.379.850.000		5.379.850.000		5.379.850.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Event atau Kegiatan Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	1	1.100.000.000	1	3.100.000.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000		
2.22.08.5.03.0001 - Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				1.100.000.000		3.100.000.000		5.379.850.000		5.379.850.000		5.379.850.000		5.379.850.000		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	1	1.100.000.000	1	3.100.000.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000	1	5.379.850.000		

4.3 Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Pembangunan daerah merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III, Program prioritas dalam RPJMD 2025–2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyelaraskan program kerja dengan delapan program strategis tersebut. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Subkegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 2. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 3. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	**Misi 1:** Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2.	Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat	1.1. Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya 1.2. Meningkatnya Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya 1.3. Meningkatnya Literasi Masyarakat	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 2. Pengembangan Bahasa dan Sastra 3. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 4. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong	**Misi 5:** Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman 1.4. Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar 1.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	6. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 7. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri 8. Penghargaan Seniman dan Budayawan 9. Festival Kebudayaan Yogyakarta 10. Gelar Budaya Jogja 11. Pelatihan Dalang Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 12. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 13. Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 14. Publikasi Seni dan Budaya Daerah 15. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota 16. Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 17. Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	

4.4 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, baik dalam konteks organisasi maupun individu. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian perangkat daerah pada akhir periode renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Selain itu, indikator kinerja juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada Dokumen Renstra ini, terdapat 2 (dua) jenis indikator kinerja yang menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua jenis indikator kinerja tersebut sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan	Persen	-	39,47%	42,12%	44,93%	47,75%	50,57%	52,38%	Tujuan
2.	Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan	Persen	-	50,68%	60,04%	69,39%	78,75%	88,10%	91,43%	Sasaran Strategis
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan	Nilai	A	A (88,286-88,5)	A (88,3-88,6)	A (88,4-88,7)	A (88,5-88,8)	A (88,6-88,9)	A (88,7-89)	Sasaran Strategis terkait RB

Sementara itu, Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	77,14%	80 %	82,22%	84%	85,45%	86,67%	87,69%	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja). Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan karena untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Yogyakarta sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ini juga disusun sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka rencana strategis yang telah disusun dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja

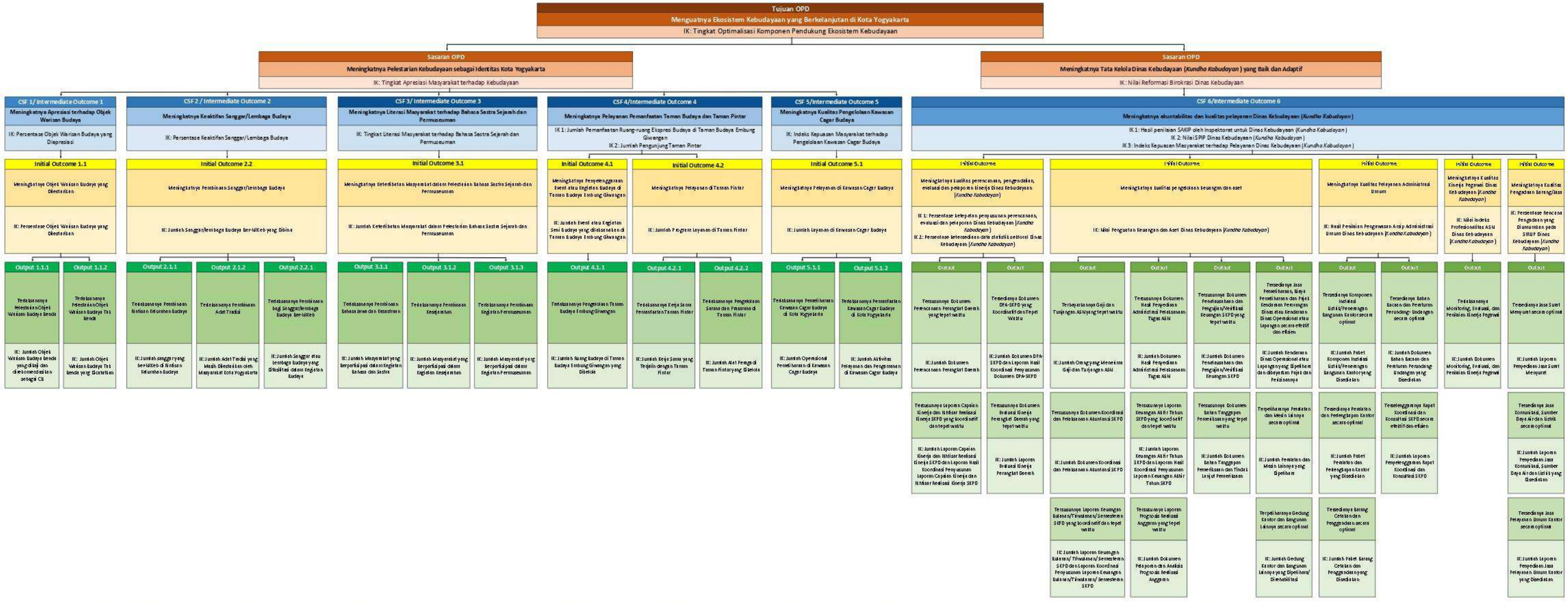

CROSSCUTTING CSF 1

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas PUPR	Pelayanan Perizinan, Perizinan bersama dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat secara mudah dan cepat
2.	Bappeda	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Budaya
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Perwakilan pelaksanaan dan pengawasan di Cagar Budaya
4.	Dinas PUPR	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
5.	Kemantren	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Cagar Budaya
6.	Dinas Perhubungan	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
7.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
8.	Dinas Perkimtan	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
9.	DPMPTSP	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
10.	Kemantren	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

CROSSCUTTING CSF 2

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas Pendidikan	Pengembangan Kegiatan Pembinaan Kebudayaan
2.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
3.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan Infrastruktur pengawasan pelaksanaan pembangunan
4.	Dinas Perkimtan	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
5.	Kemantren	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

CROSSCUTTING CSF 3

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
2.	Dinas Pendidikan	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
3.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
4.	DPMPTSP	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
5.	Kemantren	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

CROSSCUTTING CSF 4

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
2.	Dinas Pendidikan	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
3.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
4.	DPMPTSP	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
5.	Kemantren	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

CROSSCUTTING CSF 5

No.	OPD	Dukungan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
2.	Satpol PP	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
3.	Dinas Kominfo dan Persandi	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
4.	Kemantren	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

CROSSCUTTING CSF 6

No.	OPD	Dukungan
1.	Inspektorat	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
2.	Sekretariat Daerah	• Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya • Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya • Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
4.	Badan Kepangkatan dan Pengembangan Kinerja Pegawai	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya
7.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan yang menjadi penghubung antar Kawasan Cagar Budaya

2. Cascading

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa dijenjangkan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Seksi Yang mengampu indikator kegiatan	Tulis Nama Subkegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Seksi/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan
1	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta	Tingkat Optimalisasi Kontribusi Ekosistem Kebudayaan	[Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang memahami pertanjakan seni budaya + Persentase penduduk usia 10tahun keatas yang mengunjungi tempat atau peninggalan sejarah atau warisan budaya setiap tahun sebelumnya + Persentase Destinasi Sanggar atau lembaga budaya + Persentase penduduk usia 10tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertanjakan seni + Persentase Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan + Persentase objek kebudayaan yang teridentifikasi] / 5	47,36%	51%	54%	57%	61%	65%	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai identitas Kota Yogyakarta	Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan	[Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap warisan budaya + Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra sejarah dan permuseuman + Tingkat apresiasi masyarakat terhadap adat tradisi, lembaga budaya, dan seni] / 3	71,07%	72,01%	72,34%	72,67%	73,01%	73,34%	Program Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Kebudayaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya	Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase CB yang ditetapkan di Register Nasional+ Persentase WBTB yang ditetapkan sebagai WBTB Nasional] / 2	59,23%	72,33%	81,47%	90,20%	93,33%	96,67%	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase Pelestarian Cagar Budaya + Persentase Objek WBTB yang Dilaji] / 2	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksanaya Pelestarian Objek Warisan Budaya Benda	Jumlah Objek Warisan Budaya Benda yang dilaji dan ditetapkan sebagai CB	Kepala Seksi Warisan Budaya Benda
																													Adat, Seni, Tradisi dan lembaga Budaya	Meningkatnya Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase Pelestarian Cagar Budaya + Persentase Objek WBTB yang Dilaji] / 2	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksanaya Pelestarian Objek Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Objek Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda
																			Program Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Kebudayaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Sanggar/Lembaga Budaya	Persentase Kualitas Sanggar/Lembaga Budaya yang Disertasi	Jumlah lembaga budaya yang aktif dibagi jumlah sanggar/lembaga budaya yang terdaftar x 100%	39,12%	42,79%	46,45%	50,12%	53,79%	57,46%	Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Meningkatnya Pembinaan Sanggar/lembaga Budaya	Jumlah Sanggar/lembaga budaya ber-kiprah yang dibina	Jumlah lembaga budaya ber-kiprah yang dibina	Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Terlaksanaya Pembinaan Kerjasama Kelurahan Budaya	Jumlah sanggar yang ber-kiprah di Kerjasama Kelurahan Budaya	Kepala Seksi Lembaga Budaya
																																			Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksanaya Pembinaan Kerjasama Kelurahan Budaya	Jumlah sanggar yang ber-kiprah di Kerjasama Kelurahan Budaya	Kepala Seksi Lembaga Budaya
																																			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksanaya Pembinaan Adat Tradisi	Jumlah Adat Tradisi yang telah Direvitalisasi oleh Masyarakat Kota Yogyakarta	Kepala Seksi Adat Tradisi
																																			Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Terlaksanaya Pembinaan Adat Tradisi	Jumlah Adat Tradisi yang telah Direvitalisasi oleh Masyarakat Kota Yogyakarta	Kepala Seksi Adat Tradisi
																																			Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksanaya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya ber-NIKeb	Jumlah Sanggar atau lembaga budaya yang difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	Kepala Seksi Seni
																																			Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksanaya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya ber-NIK	Jumlah Sanggar atau lembaga budaya yang difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	Kepala Seksi Seni
																																			Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksanaya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya ber-NIKeb	Jumlah Sanggar atau lembaga budaya yang difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	Kepala Seksi Seni
																																			Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksanaya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya ber-NIKeb	Jumlah Sanggar atau lembaga budaya yang difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	Kepala Seksi Seni
																																			Pelatihan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksanaya Pembinaan bagi Sanggar/lembaga Budaya ber-NIKeb	Jumlah Sanggar atau lembaga budaya yang difasilitasi dalam Kegiatan Budaya	Kepala Seksi Seni
																																			Sub Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase Pelestarian Cagar Budaya + Persentase Objek WBTB yang Dilaji] / 2	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksanaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Kepala Seksi Warisan Budaya
																																			Sub Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase Pelestarian Cagar Budaya + Persentase Objek WBTB yang Dilaji] / 2	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksanaya Pelestarian Objek Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Objek Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda
																																			Sub Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Cagar Budaya	Kepala Bidang Warisan Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksanaya Pelestarian Objek Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Objek Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda
																																			Sub Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	[Persentase Pelestarian Cagar Budaya + Persentase Objek WBTB yang Dilaji] / 2

| | | |

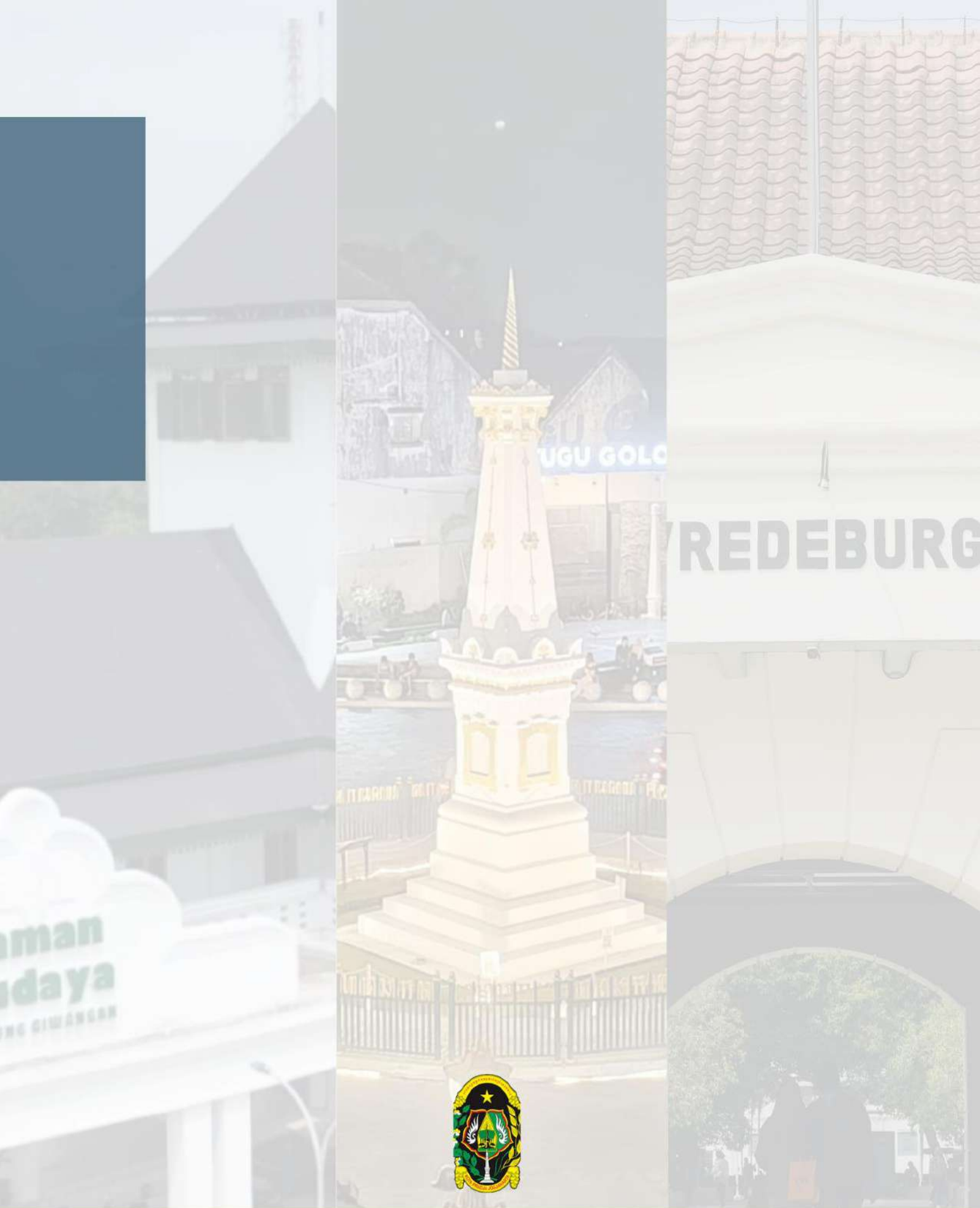

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik.

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan meningkatnya literasi masyarakat dan kualitas pengelolaan arsip serta memberikan kontribusi yang nyata bagi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan alat ukur penilaian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk lima tahun kedepan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini masih belum sempurna. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra kami di masa datang. Demikian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025 –2029 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan lima tahun kedepan secara konsisten dan akuntabel.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala,

AFIA ROSDIANA, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197205311999032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iii
DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....2
1.3. Maksud dan Tujuan.....4
1.3.1. Maksud.....4
1.3.2. Tujuan.....4
1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....5
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....5
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....5
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....6
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....10
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....15
2.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....15
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....18
2.3. Identifikasi Isu Lingkungan Dinamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....20
2.3.1. Isu Lingkungan Dinamis.....20
2.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....24
2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....28

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....32

BAB V PENUTUP.....67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.....6
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.....10
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.....12
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.....15
Tabel 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....18
Tabel 2.6. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....26
Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.....28
Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....29
Tabel 3.3. Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....30
Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....31
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....36
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....47
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....65
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....65
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.....6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang dilaksanakan sampai dengan saat ini. Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan November 2024 telah menetapkan Kepala Daerah terpilih bagi Kota Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 2025-2029. Seiring dengan ditetapkannya Kepala Daerah tersebut maka disusun pula RPJMD 2025-2029 yang mengakomodir visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 5 tahun kedepan. Selaras dengan RPJMD Kota Yogyakarta disusun pula Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut Renstra PD) memuat sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rencana Awal Strategis;
2. Tahap Penyusunan Rancangan Rencana Strategis;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis; dan
4. Penetapan Rencana Strategis.

Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan Perangkat Daerah periode yang lalu, keselarasan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten, serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis di masyarakat. Penyusunan Renstra PD juga mempertimbangkan pengarusutamaan gender dengan memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, kesempatan berusaha dan layanan publik tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, serta pemberian prioritas pada 5 kelompok rentan. Penyusunan Renstra mempertimbangkan kesetaraan bagi masyarakat untuk mengakses dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan hingga menikmati manfaatnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra PD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang (UU) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan rencana anggaran Perangkat Daerah, penyusunan laporan kinerja, serta untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya;
7. Mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

A. Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan.

B. Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terdiri:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca;
d. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan;
e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan;
f. Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan;
g. Unit Pelaksana Teknis.

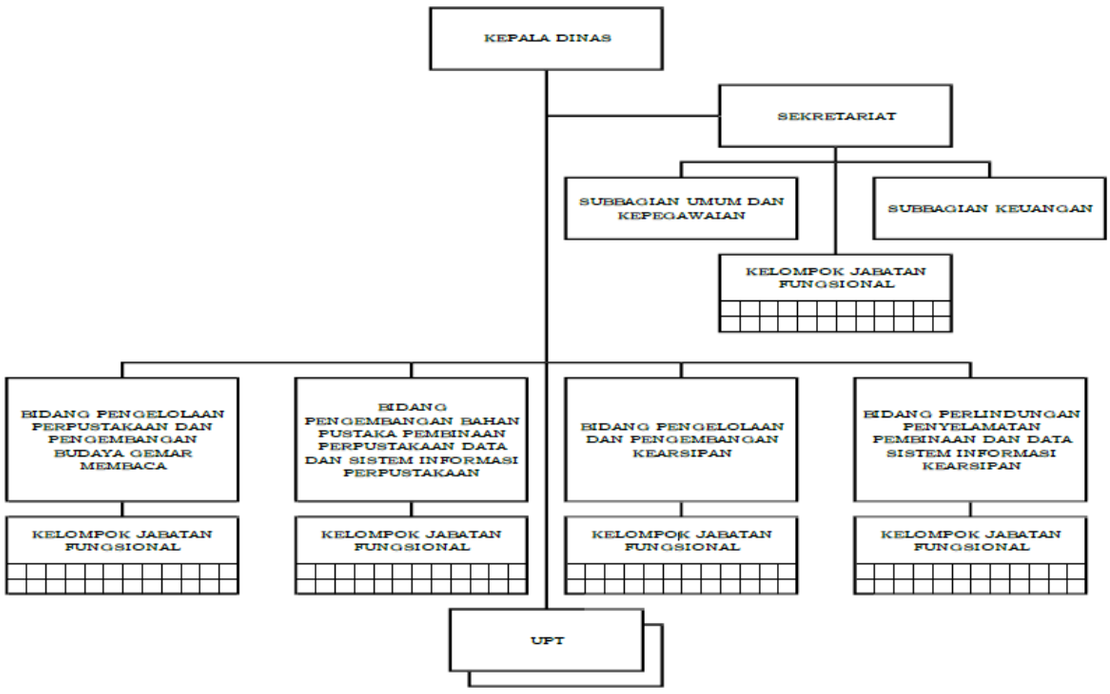

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki sumber daya yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sumber daya utama yang perlu diinformasikan dalam Rencana Strategis ini adalah sumber daya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, dan sumber daya keuangan.

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta didukung oleh 105 orang pegawai (data per Agustus 2025), dengan rincian 69 orang PNS/PPPK dan 36 orang tenaga Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP). Rincian personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
PNS/PPPK	69 orang	JLOP	36 orang
Jabatan Struktural	5 orang	JLOP pengalaman kerja ≥15 tahun	1 orang
Jabatan Fungsional Pustakawan	25 orang	JLOP pengalaman kerja ≤15 tahun	35 orang
Jabatan Fungsional Arsiparis	24 orang		
Jabatan Fungsional Perencana	2 orang		
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1 orang		
Jabatan Fungsional Umum Bidang Perpustakaan	4 orang		
Jabatan Fungsional Umum Bidang Arsip	2 orang		
Jabatan Fungsional Umum Sekretariat	6 orang		
Jumlah Total Pegawai: 105 orang			

Sumber: SIMPEG Jogja Smart Service

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta beroperasional di tiga lokasi yaitu di Jalan Letjend. Suprapto No.33A Ngampilan, Jalan Suroto No.9 Kotabaru, dan Jalan Mayjend. Sutoyo No.32 Mantrijeron. Dari tiga lokasi tersebut satu lokasi sebagai pusat layanan kearsipan dan dua lokasi sebagai pusat layanan perpustakaan. Ketiga lokasi dilengkapi sarana dan prasarana yang berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

a) Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Kearsipan

Gedung Arsip di Jalan Letjend. Suprapto No.33A Ngampilan Yogyakarta dilengkapi sarana prasarana berupa:

1) Ruang Layanan: untuk pengunjung dan tamu yang membutuhkan layanan kearsipan;
2) Ruang Transit Arsip dan Record Center: ruang penyimpanan arsip yang didapat dari luar (perangkat daerah maupun perorangan). Berfungsi untuk menyimpan arsip hasil akuisisi sebelum dilakukan tahapan kegiatan pengolahan dan arsip inaktif milik pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki retensi diatas 10 tahun. Ruangan ini dilengkapi AC, lampu, alat pemadam kebakaran, dan higrometer untuk mengontrol suhu dan kelembaban;
3) Ruang Kepala Dinas: ruang kerja dan ruang tamu kepala dinas;
4) Ruang Rapat Arya dan Aryan: ruang rapat dan ruang untuk menerima tamu dari luar;
5) Ruang Komputer: ruang komputer bagi arsiparis dalam entri data SIKN/JIKN dan pengolahan data arsip.
6) Ruang Arsiparis: ruang kerja bagi Arsiparis;
7) Ruang Bidang Kearsipan: ruang kerja pejabat struktural dan fungsional umum kearsipan;
8) Depo Arsip Statis: ruang khusus penyimpan arsip statis foto dan tekstual yang dilengkapi *roll o'pack*. Didalam ruangan ini terdapat *Vaulting Room* sehingga akses terbatas untuk memasuki ruangan ini.
9) Ruang Vaulting/*Vaulting Room*: ruangan tahan api dan gempa dengan almari besi berukuran 2m x 3,5m sebagai tempat penyimpanan arsip vital Pemerintah Kota Yogyakarta dan arsip vital DPK yang dilengkapi dengan higrometer sebagai pengatur kelembaban didalamnya;
10) Ruang Alih Media: ruang untuk alih media arsip dan pengolahan arsip hasil alih media arsip tekstual, foto, suara, ataupun video menjadi bentuk digital;
11) Ruang Pengolahan: ruang untuk mengolah arsip tekstual maupun non tekstual;
12) Ruang Pamer: lorong yang berfungsi sebagai ruang pamer arsip foto, tekstual, dan hasil kegiatan dinas yang dapat dinikmati oleh pengunjung Gedung Arsip;

13) Ruang Arsip Musnah: ruang berisi rak penyimpanan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan diusulkan untuk dimusnahkan;
14) Ruang Restorasi: ruang untuk aktivitas perbaikan arsip yang rusak;
15) Ruang Sekretariat: ruang kerja pegawai Sekretariat;
16) Ruang Aset dan Gudang:: ruang penyimpanan barang persediaan dan aset milik DPK;
17) Ruang instalasi listrik: tempat kelistrikan gedung;
18) Mushola: tempat beribadah bagi pegawai muslim;
19) Toilet dan Dapur;
20) Tempat pengolahan sampah mandiri;
21) Tempat parkir kendaraan pegawai, kendaraan operasinal DPK, dan kendaraan tamu.

b) Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Perpustakaan

Gedung Perpustakaan di Jalan Suroto No.9 Kotabaru Yogyakarta dilengkapi sarana prasarana berupa:

1) Ruang Baca: ruang bagi pemustaka untuk membaca koleksi perpustakaan;
2) Ruang Koleksi Umum: ruang berisi koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjam;
3) Ruang Layanan Sirkulasi: ruang layanan untuk peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan yang dipinjam pemustaka;
4) Ruang Layanan Belinda (Blind Corner untuk Anda): ruang layanan untuk pemustaka yang memiliki keterbatasan pada penglihatan. Koleksi yang berada di Belinda adalah buku-buku dengan huruf braille;
5) Ruang Layanan Anak: ruang layanan berisi koleksi anak yang tidak hanya berupa buku bacaan, namun terdapat pula alat peraga edukasi anak yang dapat dimainkan oleh pemustaka anak;
6) Ruang Gantari: ruang layanan naskah kuno yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan, penelitian, dan publikasi naskah kuno, serta sebagai pusat informasi dan edukasi naskah kuno bagi masyaraka;.
7) Ruang Referensi: ruang berisi koleksi-koleksi referensi yang dapat dipinjam oleh pemustaka hanya untuk dibaca di tempat;
8) Ruang Laktasi: ruang khusus yang disediakan untuk ibu menyusui. Ruang ini dilengkapi kursi sofa dan AC untuk memberikan kenyamanan bagi ibu menyusui;
9) Ruang rapat dan ruang pegawai;
10) Musholla: tempat beribadah bagi pegawai dan pemustaka muslim;
11) Toilet dan Loker;
12) Spot baca untuk akses internet gratis perpustakaan digital e-library;
13) Angkringan literasi: rak berbentuk angkringan berisi buku-buku yang dapat dibaca ditempat dengan konsep layanan mandiri pemustaka;
14) Tempat parkir kendaraan pegawai, kendaraan operasional, dan kendaraan tamu.

Gedung Perpustakaan Alternatif Wilayah Selatan Kota Yogyakarta (PEVITA) di Jalan Mayjend. Sutoyo No.32 Mantrijeron Yogyakarta dilengkapi sarana prasarana berupa:

1) Ruang Baca berisi koleksi buku perpustakaan bagi pemustaka, dimana koleksi bacaan anak lebih banyak dibanding koleksi umum;
2) Layanan Belinda (Blind Corner untuk Anda): ruang layanan untuk pemustaka yang memiliki keterbatasan pada penglihatan. Koleksi yang berada di Belinda adalah buku-buku dengan huruf braille;
3) Ruang Layanan Anak: ruang layanan berisi koleksi anak yang tidak hanya berupa buku bacaan, namun terdapat pula alat peraga edukasi anak yang dapat dimainkan oleh pemustaka anak;
4) Ruang konsultasi anak dan remaja;
5) Ruang rapat dan ruang pegawai;
6) Toilet dan Loker;
7) Tempat parkir kendaraan pegawai, kendaraan operasional, dan kendaraan tamu.

c) Koleksi Pustaka

Jumlah koleksi bahan pustaka yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta hingga tahun 2024 sebanyak 33.436 judul, dengan total jumlah buku sebanyak 50.034 eksemplar.

d) Layanan Perpustakaan Keliling

Perpustakaan Keliling merupakan bagian dari layanan perpustakaan yang mengunjungi berbagai titik layanan seperti sekolah, perpustakaan tempat ibadah, area publik, maupun event tertentu yang ada di masyarakat. Keberadaan Perpustakaan Keliling juga sekaligus sebagai sarana promosi dan peningkatan budaya baca masyarakat. Selain itu Perpustakaan Keliling juga merupakan bentuk kegiatan dari rencana aksi pengarusutamaan gender, karena melalui kegiatan perpustakaan keliling tersebut, lima kelompok rentan yang menjadi sasaran dapat terlayani dengan mendekatkan koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan kepada masyarakat.

Armada yang digunakan oleh Perpustakaan Kota Yogyakarta untuk layanan keliling ada 13 unit terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat yang difasilitasi koneksi internet, TV, terbitan berkala, serta koleksi buku perpustakaan (MONIKA - Mobil Internet dan Perpustakan Kewilayahan) yang menjangkau sekolah, kelurahan, kecamatan, dan area publik. Armada lainnya adalah 2 unit kendaraan layanan perpustakaan keliling roda empat (BILI - Mobil Internet) bagi siswa SD dan TK/PAUD yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Selain kendaraan roda 4 ada juga 9 unit kendaraan roda 3 (PUSPITA - Perpustakaan Alternatif Kota Yogyakarta) yang merupakan layanan dengan fasilitas koneksi internet, terbitan berkala, serta koleksi buku perpustakaan guna menjangkau Taman Kanak-kanak, PAUD, dan area publik di wilayah Kota Yogyakarta.

C. Sumber Daya Keuangan

Anggaran dukungan dana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.977.108.719,00 dengan komposisi sumber daya keuangan meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi sebesar Rp.15.783.935.765,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.10.634.106.000 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.149.829.765,00 sedangkan belanja modal sebesar Rp.193.172.954,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian tujuan dan sasaran strategisnya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan tingkat keberhasilan dalam menjalankan suatu urusan atau kegiatan pemerintah diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 untuk *outcome* urusan perpustakaan ada 2 (dua) yaitu Indeks Pembangunan Literasi Msyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Sedangkan untuk urusan kearsipan ada 2 (dua) yaitu "tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan" dan "tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat" sebagaimana pada Tbel 2.2.

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Perpustakaan					
IPLM	94,92	37,50	77,22	79,75	93,11
TGM	72,50	72,80	73,15	73,51	78,47
Urusan Kearsipan					
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Analisis Data

Capaian nilai IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta urusan perpustakaan didapatkan dari hasil penilaian IPLM dan TGM yang dilakukan dan dirilis oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Pada tahun 2022 ada arahan dari Perpusnas bahwa Daerah diminta untuk menghitung IPLM secara mandiri masing-masing Daerah sehingga pada tahun 2022 dan 2023 capaian IKK IPLM didasarkan pada penghitungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara mandiri. Namun demikian pada tahun 2024 capaian nilai IPLM kembali didasarkan pada hasil penilaian IPLM oleh Perpusnas dengan pertimbangan bahwa nilai IPLM mandiri tidak dapat diperbandingkan dengan daerah lainnya. Secara keseluruhan capaian IKK IPLM dan TGM dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan kecuali pada nilai IPLM tahun 2021 dimana berdasarkan hasil perhitungan Perpusnas terdapat instrument penilaian yang tidak dapat dipenuhi sehingga nilainya turun.

Capaian IKK urusan kearsipan dari tahun 2020 hingga 2024 selalu tercapai 100%. Pemenuhan data untuk penghitungan IKK urusan kearsipan didapatkan dari perhitungan sendiri terhadap ketersediaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, dan arsip yang telah diinput pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Selain itu penghitungan tingkat keberadaan arsip juga dilakukan dengan penghitungan mandiri menggunakan data yang diperoleh dari kegiatan pemusnahan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, akuisisi arsip, autentikasi dan alih media arsip, pencarian arsip, serta penerbitan izin penggunaan arsip tertutup. Jadi secara umum capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sudah baik.

IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada periode RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026 ada sedikit perbedaan. IKU pada periode Renstra 2017-2022 ada 2 yaitu “jumlah kunjungan pemustaka” dan “indeks tata kelola arsip daerah”. Sedangkan IKU pada periode Renstra 2023-2026 ada 4 yaitu “nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”, “nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat”, “nilai pengawasan tata kelola kearsipan”, dan “hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat“. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja jika disandingkan dengan target dan realisasi Sasaran periode Renstra sebelumnya memberikan hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Sesuai NSPK	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran)											
Jumlah Kunjungan Pemustaka	185.000 kunjungan	256.746 kunjungan	335.000 kunjungan	337.069 kunjungan	395.000 kunjungan	418.738 kunjungan	395.000 kunjungan	418.738 kunjungan	-	-	-
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	77,31 skala	77,52 skala	79,75 skala	79,99 skala	80,75 skala
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74,31	75
Indeks Tata Kelola Arsip Daerah	96%	100%	98%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	-	-	-	-	-	-	68 skala	88,72 skala	88.72 skala	89,82 skala	89,72 skala
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A
Indikator Kinerja Program											
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	76,5 skala	80,76 skala	77 skala	81,25 skala	78 skala	81,93 skala	78 skala 0-100	82,66 skala 0-100	78,5 skala 0-100	83,47skala 0-100	79,5 skala 0 -100
Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1100 judul	4127 judul	1200 judul	1872 judul	1300 judul	2056 judul	35.126 judul	35.747 judul	35.626 judul	37.877 judul	36.626 judul
Jumlah perpustakaan yang telah dibina	200 perpustakaan	200 perpustakaan	250 perpustakaan	250 perpustakaan	300 perpustakaan	300 perpustakaan	-	-	-	-	-
Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	-	-	-	-	-	-	35,65%	35,65%	40,28%	40,28%	49,54%

Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
Jumlah arsip statis terdigitalisasi	-	-	-	-	-	-	1000 arsip	1000 arsip	1200 arsip	1200 arsip	1500 arsip
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	114 perangkat daerah /unit kerja	114 perangkat daerah /unit kerja	140 perangkat daerah /unit kerja	140 perangkat daerah /unit kerja	152 perangkat daerah /unit kerja	152 perangkat daerah /unit kerja	-	-	-	-	-
Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	-	-	-	-	-	-	68,00%	100,00%	-	-	-
Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00%	96%	100%
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	680 arsip	680 arsip	840 arsip	840 arsip	1000 arsip	1000 arsip	1200 arsip	1200 arsip	1400 arsip	1400 arsip	1800 arsip
Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase arsip tertutup yang dilayankan	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A

Sumber: Metadata Realisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tingkat capaian kinerja terbagi atas 5 kategori yaitu “sangat tinggi” (91% ≤ 100%), “tinggi” (76% ≤ 90%), “sedang” (66% ≤ 75%), “rendah” (51% ≤ 65%), “sangat rendah’ (≤ 50%). Pada pertengahan Renstra 2017-2022 pada tahun 2020 untuk indikator ”jumlah kunjungan pemustaka” capaian kinerja kategori ”sangat tinggi” sebesar 138,78% sedangkan indikator “indeks tata kelola arsip daerah” tahun 2020 capaian kinerja ”sangat tinggi” sebesar 100% dari target. Tahun 2021 indikator ”jumlah kunjungan pemustaka” capaian kinerja kategori ”sangat tinggi” sebesar 100,62% sedangkan indikator “indeks tata kelola arsip daerah” tahun 2021 tercapai 100% dengan kategori ”sangat tinggi”. Tahun 2022 untuk indikator ”jumlah kunjungan pemustaka” capaian kinerja sebesar 106,01% kategori ”sangat tinggi”. Meskipun selama periode Renstra terjadi pandemik covid dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2020 hingga 2022, namun target tetap bisa tercapai dikarenakan adanya inovasi layanan perpustakaan keliling yang menjangkau ke masyarakat. Armada perpustakaan keliling hadir ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan layanan perpustakaan. Capaian kinerja indikator “indeks tata kelola arsip daerah” dari tahun 2020 hingga 2022 juga tercapai 100% kategori ”sangat tinggi”. Target selalu tercapai selama periode Renstra ini karena adanya inovasi layanan kearsipan dan kegiatan pendampingan pengelolaan arsip yang dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra PD 2023-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Realisasi Sasaran pada tahun 2023 untuk indikator “nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” adalah sebesar 103,16% kategori ”sangat tinggi”. Sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja 100,30% ”sangat tinggi”. Indikator ”nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat” tercapai 100,42% kategori ”sangat tinggi”. Realisasi indikator ”nilai pengawasan tata kelola kearsipan” pada tahun 2023 tercapai 130,47% kategori ”sangat tinggi”, sedangkan pada tahun 2024 tercapai 101,24% kategori ”sangat tinggi”. Realisasi indikator ”hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” pada tahun 2023 dan 2024 terealisasi 100% dengan kategori ”sangat tinggi”. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari kegiatan pembinaan terus menerus ke perpustakaan sekolah, perpustakaan instansi, maupun Kampung Baca. Juga karena adanya pendampingan pengelolaan kearsipan oleh arsiparis LKD ke unit kerja di wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan dampak positif bagi pengelolaan arsip Perangkat Daerah. Selain itu juga karena adanya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada periode Renstra sebelumnya. Tinjauan terhadap kinerja keuangan dalam rentang Renstra sebelumnya perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja Keuangan (%)
2020	8.051.916.592	7.860.969.363,42	97,63
2021	13.439.380.688	12.388.081.969,61	92,18
2022	13.461.488.766	12.152.198.669	90,27%
2023	15.029.159.709	14.143.643.058	94,11%
2024	21.891.905.591	20.637.139.735,	94,27%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Anggaran yang mendukung pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berbeda-beda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang. Rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 92,18% hingga 97,63%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang paling kecil dalam periode Renstra sebelumnya, sebesar 92,18%. Hal ini antara lain disebabkan adanya efisiensi anggaran pada masa pandemi. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil, namun efisiensi tersebut belum semua terwadahi dalam anggaran perubahan sehingga penyerapan anggaran menjadi belum optimal pada akhir tahun anggaran.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran utama layanan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah masyarakat umum dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Masing-masing urusan memberikan layanan yang berbeda sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

2.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah perlu dikaji dan dipertimbangkan guna keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah secara lebih efektif dan akuntabel. Hambatan bisa menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah dalam mengatasi dan memberi jalan keluar pemecahan atas masalah yang ada. Kerjasama dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan layanan dapat menjadi kunci keberhasilan dan solusi alternatif bagi Perangkat Daerah. Pentingnya kolaborasi dengan pihak lain inilah yang mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatannya bermitra dengan Perangkat Daerah dan *stake holder* lainnya diantaranya dengan:

- Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian: bermitra dalam penyediaan wifi gratis yang bisa diakses oleh pemustaka di Perpustakaan Kotabaru dan Perpustakaan Pevita serta sumber data jumlah pengguna internet layanan perpustakaan;

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: bermitra dalam layanan perpustakaan anak (konsultasi anak dan remaja, serta Kelas Parenting);
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga: bermitra dalam pembinaan perpustakaan sekolah SD dan SMP;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: bermitra dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan dan tenaga kearsipan;
- Bagian Hukum dan Bagian Organisasi: bermitra dalam penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan.

Memasuki awal Renstra 2025-2029, pada pertengahan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengembangkan jalinan kemitraannya dengan beberapa *stake holder,* yaitu:
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I.Y: bermitra dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi sistem perpustakaan terpadu *Jogja Library for All* dalam lingkup Jaringan Informasi koleksi perpustakaan, penyediaan akses informasi, pemanfaatan sumber informasi Silang Layan dan atau Silang Pinjam, serta penggunaan fasilitas di perpustakaan;
- Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada: bermitra dalam pemanfaatan layanan perpustakaan, pengembangan budaya gemar membaca, dan penguatan literasi dalam lingkup Silang Layan dan sumber daya informasi pada layanan referensi dan terbitan berkala dalam bentuk cetak maupun digital, kolaborasi kegiatan pengembangan budaya gemar membaca dalam program Bank Buku (*Bank Donation*), peningkatan kapasitas pustakawan atau pengelola perpustakaan dalam pengembangan layanan perpustakaan, serta upaya peningkatan literasi;
- Universitas Mercu Buana Yogyakarta: bermitra dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah literasi parenting di Kota Yogyakarta dimana obyek kemitraan meliputi peningkatan literasi parenting masyarakat dengan narasumber berbasis pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah, serta penyelenggaraan literasi parenting kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja Renstra sebelumnya dengan menggunaan metode analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan/kekurangan, peluang, dan ancaman yang masih ada pada capaian kinerja layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Renstra sebelumnya agar Renstra berikutnya menjadi lebih baik.

a. Kekuatan (*Strengths*)

1) Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
2) Dukungan dari masyarakat dan Perangkat Daerah Pemkot Yogyakarta untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
3) Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya;
4) Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan;

5) Adanya pengembangan sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan dan kearsipan;

b. Kelemahan/Kekurangan (*Weaknesses*)

1) Pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya mundur dari tatakala semula karena ada perpanjangan masa penyelesaian pekerjaan akibat permasalahan finansial penyedia jasa;
2) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tatakala karena menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada selesai;
3) Partisipasi masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno masih rendah meskipun telah dilakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman tentang arti penting keberadaan naskah kuno;
4) Adanya ketentuan TKDN terhadap barang/peralatan komputer yang sebagian besar masih berstatus import sehingga kebutuhan akan barang modal tersebut tidak dapat dipenuhi;
5) Pengusulan pengadaan barang import terbatas waktunya hanya pada bulan Februari dan pada tahapan penganggaran perubahan saja sehingga jika tidak mengetahui status barang sejak awal besar kemungkinan pengadaan tidak akan dapat direalisasikan.

c. Peluang (*Opportunities*)

1) Gedung Perpustakaan yang selesai dibangun tahun 2024 bisa dimanfaatkan secara optimal bagi layanan perpustakaan kepada masyarakat dan menunjang kinerja tahun 2025;
2) Dilakukan pendampingan pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan ditingkat satuan Pendidikan yang belum sesuai SNP dan menyelenggarakan kegiatan lomba perpustakaan sekolah untuk mendorong semangat pengelola perpustakaan;
3) Dilakukan penguatan kualitas SDM melalui pendampingan pengelolaan arsip secara berkesinambungan kepada unit pengolah dan unit kearsipan di seluruh OPD Pemerintah Kota Yogyakarta;
4) Dilakukan pendataan/stock opname buku pada akhir tahun sehingga dapat diketahui lebih awal ketersediaan koleksi buku dan kebutuhan pembelian buku karena adanya penghapusan buku;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta;
6) Naskah kuno yang sudah didapatkan dari masyarakat diolah dan dilayankan dalam katalog naskah kuno dan didayagunakan agar terlihat kemanfaatannya bagi masyarakat.

d. Ancaman (Threats)

1) Ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala perencanaan akan mengakibatkan pencapaian target tidak terpenuhi;
2) Beberapa kegiatan akan tidak terlaksana atau terlaksana tanpa dukungan anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan analisis SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang dimiliki sangat berpeluang untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Namun demikian, pada akhir tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025 masih didapati kendala maupun permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut:

Tabel 2.5.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	• Belum semua perpustakaan sekolah SD/SMP memiliki Tenaga/Pengelola Perpustakaan yang mempunyai kompetensi bidang perpustakaan dan belum memiliki koleksi, gedung dan sarpras yang memadai • Perpustakaan Digital belum diakses secara optimal oleh Pemustaka • Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui aktivitas berbasis perpustakaan • Perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sumber belajar dan tempat rekreasi yang edukatif.	• Meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP) melalui pembinaan perpustakaan • Meningkatkan Kualitas Pengembangan bahan pustaka • Memasang spotbaca di area publik • Pengusulan bantuan buku ke Perpustakaan Nasional untuk perpustakaan khusus • Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah melalui bimtek bagi pengelola perpustakaan sekolah non ASN • Meningkatkan Gerakan Budaya Baca Masyarakat Yogyakarta melalui berbagai aktifitas Gerakan Budaya Baca • Mensosialisasikan kembali Gerakan sumbang buku ke Bank Buku melalui media publikasi dan media sosial • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan • Meningkatkan inovasi perpustakaan dan layanan prima
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	• Lembaga Kearsipan Daerah dikenal masyarakat masih sebatas sebagai tempat penyimpanan arsip dan pengelolaan arsip daerah saja dan belum dimanfaatkan secara lebih opmimal sebagai sarana edukasi • keterbatasan sarana pengalihmediaan arsip kartografi dan arsip tekstual yang berukuran besar	• Publikasi dan Pameran Arsip sebagai informasi sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus pemimpin Kota Yogyakarta • Mengoptimalkan sarana dan prasarana digitasi/alih media arsip statis yang tersedia dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki sarana pengalihmediaan arsip dengan ukuran besar
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan c. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota d. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	• Keberadaan Arsip Statis (Arsip Tekstual, arsip Foto, Arsip Rekam Suara, Arsip Kartografi, dan Arsip Film) masih sebatas dialihmediakan dan belum didayagunakan kemanfaatannya secara lebih luas lagi	• Dilakukan publikasi kebermanfaatan arsip dalam berbagai kegiatan di masyarakat maupun pemerintahan
5	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	• Lamanya identifikasi dan penyusunan daftar arsip tertutup terutama bagi arsip yang belum ditetapkan sebagai arsip tertutup	• Dilaksanakan proses identifikasi arsip tertutup • Menyusun Daftar Arsip Tertutup
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala maupun yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan skema efisiensi anggaran	• Dilakukan prioritas pelaksanaan kegiatan saat menyusun perencanaan anggaran

	a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Adanya beberapa jenis barang yang dibutuhkan namun belum tersedia komponen dalam negerinya sehingga harus melalui prosedur import	• Mengajukan usulan pengadaan barang impor sesuai ketentuan

Sumber: Hasil Analisis Data

2.3. Identifikasi Isu Lingkungan Dinamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.3.1. Isu Lingkungan Dinamis

Pembangunan Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh berbagai aspek perubahan dan perkembangan baik secara global, nasional, maupun regional. Pembangunan secara berkelanjutan merupakan salah satu hal penting yang menjadi isu global sebagai bentuk komitmen dunia yang tergabung dalam perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mewujudkan 17 tujuan global yang harus dilaksanakan oleh dunia. Tujuan SDGs berupa pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan kesetaraan gender menjadi isu penting untuk diadopsi hingga penentuan isu strategis Perangkat Daerah. Selain itu, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim juga menjadi isu global yang diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk membatasi pemanasan global dibawah 2˚C dan

pengurangan emisi gas rumah kaca akibat aktifitas industri dan pembangunan.

Selain isu global, kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh isu nasional yang melibatkan dan berpengaruh pada kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang perlu dicarikan solusi bersama. Perjanjian Paris mendorong komitmen Indonesia untuk mengendalikan dan mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, reklamasi lahan, penataan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman. Masih adanya ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan serta ketahanan sosial ekonomi dan risiko kebencanaan juga menjadi isu yang diadopsi kedalam isu regional.

Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya, pendidikan, pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Tujuan dilakukannya penataan ruang yaitu untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan. Kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah meliputi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui strategi pengembangan pola ruang yang terdiri dari kawasan peruntukan lindung, kawasan peruntukan budi daya, dan kawasan strategis kota. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas Kawasan Lindung Setempat berupa sempadan sungai ditetapkan seluas kurang lebih 14 hektar, Ruang Terbuka Hijau Privat berupa lahan pekarangan rumah/gedung milik masyarakat/swasta dan atau institusi paling sedikit 10% luas wilayah Daerah, Ruang Terbuka Hijau Publik berupa taman di atap bangunan, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan seluas 626 hektar. Kawasan peruntukan budi daya meliputi kawasan pemukiman, dan

kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis kota di Daerah berorientasi pada pembentukan Citra kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

RTRW Kota Yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang Kota Yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik sehingga seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan dalam konteks spasial.

Berdasar pada RTRW Kota Yogyakarta yang telah disusun sedemikian rupa, maka program dan kegiatan Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga telah mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dan pemanfaatannya dalam perencanaan strategis. Kota Yogyakarta yang rawan bencana gempa bumi dan banjir seperti wilayah bantaran sungai yang padat penduduk menjadikan penyusunan program kegiatan juga mempertimbangkan mitigasi kebencanaan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting keberadaan arsip bagi pribadi maupun organisasi menjadikan peluang mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan arsip juga semakin luas. Terjadinya bencana juga terkadang menjadikan arsip rusak, hilang, bahkan musnah sehingga histori arsip pun terputus. Digitisasi arsip menjadi hal yang penting sebagai upaya penyelamatan arsip dari kerusakan, bencana, maupun kehilangan, serta sebagai *backup* arsip agar jika terjadi sesuatu terhadap arsip aslinya masih ada data yang tersimpan. Wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri dari banyak kampung menjadi pertimbangan tersendiri dalam perencanaan program kegiatan guna meningkatkan literasi masyarakat dan pembudayaan gemar membaca. Perpustakaan sebagai jembatan ilmu dan informasi bagi masyarakat didesain juga agar dapat menjangkau dan dimanfaatkan keberadaannnya oleh masyarakat di pelosok kampung. Perpustakaan Pevita yang ada di Kota Yogyakarta wilayah selatan merupakan upaya untuk mendekatkan akses masyarakat yang berada di kawasan penyangga kota terhadap perpustakaan. Perpustakaan keliling yang terdiri dari 13 armada ya ng hadir pada berbagai titik lokasi *public area*, halaman tempat ibadah, acara/*event* tertentu, maupun Kampung Baca kelurahan juga merupakan upaya untuk mendekatkan akses layanan perpustakaan ke masyarakat. Selain itu keberadaan perpustakaan digital juga menjadi upaya peningkatan literasi berbasis internet yang bisa dijangkau dan diakses masyarakat dari berbagai lokasi tanpa dibatasi oleh wilayah.

Faktor pendorong ditinjau dari telaah RTRW diatas antara lain adalah dukungan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan literasi melalui kampung

baca, layanan perpustakaan keliling yang menjangkau ke berbagai kawasan strategis kota, telah tersimpannya arsip kawasan cagar budaya Kotabaru dan arsip vital Pemerintah Kota Yogyakarta, serta adanya bermacam inovasi layanan perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah keterbatasan sumber daya pengelolaan perpustakan pada perpustakaan yang dibina Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan masih adanya keterbatasan sarana prasarana digitisasi arsip.

2.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam penyusunan rencana program dan kegiatannya mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dinamika yang ada di masyarakat. Selain itu perencanaan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebutuhan akan perlunya mitigasi kebencanaan, seperti kegiatan sosialisasi yang mengedukasi warga bantaran sungai yang rawan kebanjiran bagaimana merawat, menyimpan dan menyelamatkan arsip-arsip penting keluarga seperti sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen lainnya. Penyusunan program dan kegiatan juga perlu mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana isu global saat ini tentang permasalahan sampah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berupaya menjaga kualitas lingkungan dengan mengolah sampah secara mandiri, menjadikan sampah sapuan sebagai bahan pembuatan kompos yang digunakan untuk pupuk tanaman dan tetumbuhan di sekitarnya. Selain itu juga mengedukasi pegawai dan pengunjung perpustakaan untuk secara bijak mengelola sampah sejak dari sumbernya dengan membuang sampah ke tempat sampah yang tersedia di perpustakaan secara terpilah organik dan non organik sesuai jenis sampahnya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan semakin tingginya pengetahuan masyarakat menjadi pendorong bagi Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk mencapai target kinerja. Demikian juga dengan mitigasi risiko strategis dan upaya pengalokasian anggaran guna pembuatan sarana pendukung pengolahan sampah secara mandiri.

2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kota Yogyakarta memiliki 216 perpustakaan sekolah SD/SMP/SMA, 127 perpustakaan khusus instansi, dan 1 perpustakaan daerah. (sumber: Form Analisa Data 2024). Idealnya semua perpustakaan memiliki pustakawan atau tenaga khusus perpustakaan yang memadai sesuai banyaknya pemustaka yang dilayani. Namun karena

keterbatasan personil, tidak semua perpustakaan memiliki tenaga khusus perpustakaan. Petugas yang melayani pemustaka kadang juga memiliki tugas lain sebagai tugas utamanya. Semakin majunya teknologi informasi dan adanya keterbatasan tenaga khusus perpustakaan mendorong perlunya ketersediaan dan pengolahan data perpustakaan berbasis digital yang memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara mandiri. Namun demikian, ketersediaan buku elektronik juga menjadi kendala tersendiri dengan harganya yang relatif lebih mahal dibanding buku cetak. Selain itu ketersediaan jaringan internet juga menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Kota Yogyakarta dengan sebutannya sebagai Kota Sejarah sedikit banyak memberikan gambaran betapa sebenarnya banyak potensi dokumen, arsip, maupun naskah kuno masa lalu yang bisa dikumpulkan, disimpan dan diselamatkan. Digitisasi melalui pengalihmediaan juga merupakan salah satu cara pelestarian naskah kuno yang ada di masyarakat yang memiiki nilai historis tinggi. Terbatasnya tenaga arsiparis serta sarana pengolah dan penyimpanan arsip pun membuat belum semua arsip yang telah terkumpul dapat diolah dan didata.

Pemberian layanan perpustakaan dan kearsipan dilakukan dengan mengedepankan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Layanan langsung maupun digital *online* dengan tetap memperhatikan responsif gender diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan mendapatkan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses, memenuhi kebutuhan, dan mengambil manfaat dari layanan yang diberikan tanpa membedakan jenis kelamin. Pencapaian sasaran pembangunan dari aspek pengembangan budaya literasi dan manajemen kearsipan berusaha diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, maupun layanan yang mempermudah pemenuhan kebutuhan akan informasi dan akses data bagi masyarakat.

Penutupan tempat pembuangan sampah umum menjadikan Perangkat Daerah harus bisa mengelola sampah secara mandiri sehingga bisa mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan menjaga lingkungan tetap sehat. Perangkat Daerah mampu mengolah sampah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan dapat memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi berguna dan memiliki nilai manfaat bagi lingkungan.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai baik ASN maupun non ASN untuk memiiki kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangannya yang sangat pesat. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi secara nasional dalam proses pengadministrasian kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelaporan capaian kinerja, dan penyajian data statistik sektoral menjadikan penguasaan kemampuan bidang teknologi informasi ini sebagai suatu hal yang wajib dimiliki oleh semua pegawai untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai perlu terus diupayakan secara berkesinambungan guna memberikan bekal bagi pegawai untuk handal dan melek teknologi serta optimal memanfaatkan media informasi dan media sosial yang ada dalam pelaksanaan program kegiatan.

Ditinjau dari permasalahan, faktor pendorong, faktor penghambat, dan isu-isu yang ada di masyarakat perlu dirumuskan isu strategis yang diangkat dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah. Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta setelah dilakukan beberapa telaah dan analisa pada sub bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan budaya gemar membaca dan peningkatan literasi;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dinamis dan inovatif;
3. Pengarusutamaan Naskah Kuno dan budaya etnis nusantara;
4. Pembinaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
5. Pengembangan Tata Kelola Kearsipan;
6. Pengembangan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
7. Pengembangan Pelayanan Arsip Statis Tertutup;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai sumber daya manusia yang handal dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman;
9. Pengelolaan perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pengadministrasian barang milik daerah yang akuntabel.

Tabel. 2.6. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- karakteristik masyarakat yang cenderung progresif dan jaringan komunitas yang aktif; - pusat pendidikan dan budaya nasional; - tingginya tingkat kesadaran masyarakat, komunitas lingkungan yang aktif, serta dorongan inovasi sektor swasta;	- Belum semua perpustakaan sekolah SD/SMP memiliki Tenaga/Pengelola Perpustakaan yang mempunyai kompetensi bidang perpustakaan dan belum memiliki koleksi, gedung dan sarpras yang memadai - Perpustakaan Digital belum diakses secara optimal oleh Pemustaka - Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui aktivitas berbasis perpustakaan - Perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sumber belajar dan tempat rekreasi yang edukatif - Lembaga Kearsipan Daerah dikenal masyarakat masih sebatas sebagai tempat penyimpanan arsip dan pengelolaan arsip daerah saja dan belum dimanfaatkan secara lebih opmimal sebagai sarana edukasi - keterbatasan sarana pengalihmediaan arsip kartografi dan arsip tekstual yang berukuran besar - Keberadaan Arsip Statis (Arsip Tekstual, arsip Foto, Arsip Rekam Suara, Arsip Kartografi, dan Arsip Film) masih sebatas dialihmediakan dan belum didayagunakan kemanfaatannya secara lebih luas lagi - Lamanya identifikasi dan penyusunan daftar arsip tertutup terutama bagi arsip yang belum ditetapkan sebagai arsip tertutup	- pengelolaan persampahan yang belum optimal;	- komitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) - perubahan iklim global - ketidakpastian kondisi ekonomi dunia	- tantangan transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan - ketimpangan akses terhadap pendidikan, - ketahanan sosial ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana - peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional	- menurunnya kualitas lingkungan - penanganan masalah sampah - penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia - penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; - peningkatan kualitas layanan publik untuk mewujudkan Good Government Governance	- Pengembangan budaya gemar membaca dan peningkatan literasi; - Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dinamis dan inovatif; - Pengarusutamaan Naskah Kuno dan budaya etnis nusantara; - Pembinaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP); - Pengembangan Tata Kelola Kearsipan; - Pengembangan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; - Pengembangan Pelayanan Arsip Statis Tertutup; - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai sumber daya manusia yang handal dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman; - Pengelolaan perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pengadministrasian barang milik daerah yang akuntabel.

	- adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala maupun yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan skema efisiensi anggaran - Adanya beberapa jenis barang yang dibutuhkan namun belum tersedia komponen dalam negerinya sehingga harus melalui prosedur import					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Tujuan pembangunan daerah mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Tabel berikut menunjukkan kesesuaian dan konsistensi strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta periode 2025-2029 dengan visi dan misi rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	: Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 1 RPJMD	: mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan		
Tujuan RPJMD	: Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		
Tujuan Perangkat Daerah	**Sasaran Perangkat Daerah**	**Strategi Perangkat Daerah**	**Arah Kebijakan Perangkat Daerah**
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Melaksanakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan sesuai kewenangan
		Meningkatkan nilai indeks kepuasan layanan perpustakaan	Melaksanakan pembudayaan gemar membaca
		Meningkatkan persentase naskah kuno yang didayagunakan	Melaksanakan pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno, serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara
Visi RPJMD	: Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 4 RPJMD	: mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945		
Tujuan RPJMD	: Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan		
Tujuan Perangkat Daerah	**Sasaran Perangkat Daerah**	**Strategi Perangkat Daerah**	**Arah Kebijakan Perangkat Daerah**
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Meningkatkan persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan)	Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

		Meningkatkan persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip Pemerintah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta yang dilakukan pemekaran, penilaian dan penetapan hasil alih media arsip, pencarian arsip statis Pemerintah Kota yang dinyatakan hilang
		Meningkatkan persentase arsip statis tertutup yang dilayankan	Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang bersifat tertutup
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif	Meningkatkan nilai SAKIP, SPIP, dan IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja; - Melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan, pengadministrasian barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah; layanan pengadministrasian umum; peningkatan kualitas kinerja pegawai; peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Cascading Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah diatas didapatkan dengan menggunakan teknik perumusan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks (Skala 0-100))	93.11	93.12	93.13	93.14	93.15	93.16	93.17	
			Nilai pengawasan kearsipan eksternal (Indeks (Skala 0-100))	95.45	95.45	95.46	95.47	95.48	95.49	95.50	
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) (Indeks (Skala 0-100))	78,47	78,57	78,67	78,77	78,87	78,97	79,07	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi (Nilai)	89.82	89.84	89.86	89.88	89.90	89.92	89.94	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Nilai)	A	A	A	A	A	AA	AA	

Sumber: sipd-ri.kemenpan.go.id

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 perlu disusun dalam beberapa pentahapan sebagai kerangka waktu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Setiap tahapan menggambarkan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah dalam memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan.

Selaras dengan RPJMD Kota Yogyakarta, tahapan pembangunan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terbagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu:

- Tahun pertama (Tahap I): penyiapan kebijakan dan penguatan sumber daya, yaitu dengan penyusunan program kegiatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penguatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana prasarana secara efektif dan efisien;
- Tahun kedua (Tahap II): peningkatan akses dan kualitas layanan publik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat, serta melakukan berbagai inovasi layanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan layanan yang disediakan secara murah, mudah dan cepat;
- Tahun ketiga (Tahap III): akselerasi target pembangunan, yaitu dengan melakukan evaluasi sekaligus mengkaji pencapaian target pembangunan hingga pertengahan periode Renstra dengan kesesuaian arah kebijakan pembangunan yang diambil agar tetap di jalur yang telah direncanakan sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai;
- Tahun keempat (Tahap IV): pembangunan yang berkelanjutan, yaitu tahapan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dari tahun pertama hingga ketiga telah sesuai Renstra, dapat mencapai target akhir periode Renstra, pelaksanaan program kegiatan terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang luas dan merata, serta dapat dilaksanakan lagi secara berkelanjutan;
- Tahun kelima (Tahap V): penyelesaian dan kesinambungan pembangunan, yaitu tahap dimana program kegiatan tercapai sesuai target tahunannya sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan Perangkat Daerah, untuk kemudian melangkah ke periode Renstra berikutnya dalam pencapaian pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 3.3. Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2025 - 2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Penyiapan Kebijakan dan Penguatan Sumber Daya	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Target Pembangunan	Pembangunan yang Berkelanjutan	Penyelesaian dan Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan			
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip			
	Sasaran:			
1.1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Peningkatan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, melalui: a. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan b. Meningkatkan penguatan literasi dan budaya gemar membaca	Melaksanakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan sesuai kewenangan	
			Melaksanakan pembudayaan gemar membaca	
			Melaksanakan pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno, serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara	
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip, melalui: a. Meningkatkan tata kelola kearsipan b. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip c. Meningkatkan penyelesaian arsip tertutup	Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	
			Melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip Pemerintah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta yang dilakukan pemekaran, penilaian dan penetapan hasil alih media arsip, pencarian arsip statis Pemerintah Kota yang dinyatakan hilang	
			Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang bersifat tertutup	
1.3.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif	- Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah - Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah	- Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja; - Melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan, pengadministrasian barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah; layanan pengadministrasian umum; peningkatan kualitas kinerja pegawai; peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	

Sumber: Raperda RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menyusun program kerja yang terdiri dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra untuk tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana program kerja tahun 2030 ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada Renstra 2025-2030 sebagaimana uraian berikut:

1. **Program Pembinaan Perpustakaan**

   Terdiri dari 2 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

   a. **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

      Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
      2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      3) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
      4) Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
      5) Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
      6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      7) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
      8) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
      9) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
      3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
      4) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

2. **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

   Terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

   a. **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**

      Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
      2) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

b. **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

3. Program Pengelolaan Arsip

Terdiri dari 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Terdiri dari 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

d. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

5. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program Perizinan Penggunaan Arsip terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2030 sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR			PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat - Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip				Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks (Skala 0-100))				
					Nilai pengawasan kearsipan eksternal (Indeks (Skala 0-100))				
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) (Indeks (Skala 0-100))				
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Persentase)			2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
					Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Nilai)				
				Meningkatnya Koleksi Perpustakaan		Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (Judul)		2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
				Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan		jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi (orang)		2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perpustakaan Berbasis Elektronik	persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan (persen)		2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
						Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
						Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Meningkatnya Pemanfataan Perpustakaan	persentase penambahan Pemustaka (persen)		2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Baca		jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca (orang)		2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno		Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan (Persentase)			2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Meningkatnya Data Naskah Kuno yang Dilestarikan		jumlah data naskah kuno (judul)		2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	

							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
				Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan (judul)		2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip			Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi (Nilai)				
			Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan		persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) (Persentase)			2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis		persentase arsip dinamis yang selesai dikelola (persen)		2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	

							Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis		persentase arsip statis yang dikelola (persen)		2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)		jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dientri dalam Simpul JIKN (arsip)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Arsip)			2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Meningkatnya Penyusutan Arsip		persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku (persen)		2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	

				Meningkatnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran		Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK (persen)		2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Preservasi Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi (arsip)		2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Meningkatnya penelusuran arsip yang dinyatakan hilang		persentase daftar arsip yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Persen)		2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
			Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup		persentase arsip statis tertutup yang dilayankan (Persentase)			2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Tertutup		jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola (arsip)		2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	

		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Nilai)				
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan DPK		Nilai SAKIP DPK (Predikat)			2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP DPK (Predikat)				
					Nilai IKM DPK (Predikat)				
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPK		Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK (persen)		2.24.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK (persen)			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.24.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.24.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.24.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.24.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.24.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.24.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.24.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.24.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.24.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.24.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPK		Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK (Nilai)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.24.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.24.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.24.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum		Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK (Nilai)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.24.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.24.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.24.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.24.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.24.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.24.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.24.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.24.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.24.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa		Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DPK (Persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.24.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.24.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.24.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.24.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.24.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.24.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.24.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.24.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.24.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.24.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.24.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.520.072.500		1.550.975.573		1.590.339.335		1.633.580.659		1.689.841.177		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.414.416.500		1.443.171.587		1.479.799.283		1.520.035.023		1.572.385.030		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Nilai)	Nilai	83,47	84,47	1.414.416.500	84,97	1.443.171.587	85,47	1.479.799.283	85,97	1.520.035.023	86,47	1.572.385.030	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Persentase)	Persentase	39,55	44,09		46,36		48,64		50,91		53,18			
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.280.985.500		1.307.027.935		1.340.200.305		1.376.640.349		1.424.051.843		
Meningkatnya Koleksi Perpustakaan	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (Judul)	Judul	37877	39477	170.880.000	40277	174.353.990	41077	178.779.095	41877	183.640.098	42677	189.964.663		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					170.880.000		174.353.990		178.779.095		183.640.098		189.964.663		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	Eksemplar	1.000	1.000	170.880.000	1.000	174.353.990	1.000	178.779.095	1.000	183.640.098	1.000	189.964.663		

Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perpustakaan Berbasis Elektronik	Persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan (Persen)	Persen	28,30	34,73	155.287.500	37,94	158.444.495	41,16	162.465.817	44,37	166.883.261	47,59	172.630.721	
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					63.465.500		64.755.754		66.399.255		68.204.650		70.553.619	
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Perpustakaan	8	8	63.465.500	8	64.755.754	8	66.399.255	8	68.204.650	8	70.553.619	
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					6.030.000		6.152.590		6.308.743		6.480.277		6.703.458	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Perpustakaan	2	2	6.030.000	2	6.152.590	2	6.308.743	2	6.480.277	2	6.703.458	
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat					704.000		718.312		736.543		756.570		782.626	
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	Eksemplar	0	19.000	704.000	19.500	718.312	20.000	736.543	20.500	756.570	21.000	782.626	
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan					852.000		869.321		891.385		915.621		947.155	
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	Dokumen	1	1	852.000	1	869.321	1	891.385	1	915.621	1	947.155	

2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					84.236.000		85.948.518		88.129.891		90.526.143		93.643.863		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	Perpustakaan	1	1	84.236.000	1	85.948.518	1	88.129.891	1	90.526.143	1	93.643.863		
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi (Orang)	Orang	111	171	3.310.000	201	3.377.292	231	3.463.008	261	3.557.167	291	3.679.676		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.310.000		3.377.292		3.463.008		3.557.167		3.679.676		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	4	4	3.310.000	4	3.377.292	4	3.463.008	4	3.557.167	4	3.679.676		
Meningkatnya Pemanfataan Perpustakaan	Persentase penambahan Pemustaka (Persen)	Persen		4	951.508.000	4	970.852.158	4	995.492.385	4	1.022.559.823	4	1.057.776.783		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					940.948.000		960.077.473		984.444.239		1.011.211.278		1.046.037.394		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Perpustakaan	2	2	940.948.000	2	960.077.473	2	984.444.239	2	1.011.211.278	2	1.046.037.394		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota					10.560.000		10.774.685		11.048.146		11.348.545		11.739.389		

Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	Layanan	2	2	10.560.000	2	10.774.685	2	11.048.146	2	11.348.545	2	11.739.389		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					133.431.000		136.143.652		139.598.978		143.394.674		148.333.187		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Baca	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca (Orang)	Orang	3000	3400	133.431.000	3600	136.143.652	3800	139.598.978	4000	143.394.674	4200	148.333.187		
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					23.839.000		24.323.647		24.940.981		25.619.126		26.501.449		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	Orang	17	17	23.839.000	17	24.323.647	17	24.940.981	17	25.619.126	17	26.501.449		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					38.513.000		39.295.969		40.293.301		41.388.876		42.814.309		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)		10	10	38.513.000	10	39.295.969	10	40.293.301	10	41.388.876	10	42.814.309		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					39.308.000		40.107.132		41.125.051		42.243.241		43.698.098		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	Orang	6	6	39.308.000	6	40.107.132	6	41.125.051	6	42.243.241	6	43.698.098		

2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					31.771.000		32.416.904		33.239.645		34.143.431		35.319.331		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	Lokus	3	3	31.771.000	3	32.416.904	3	33.239.645	3	34.143.431	3	35.319.331		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					105.656.000		107.803.986		110.540.052		113.545.636		117.456.147		
Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan (Persentase)	Persen	0	45,25	105.656.000	56,56	107.803.986	67,87	110.540.052	79,19	113.545.636	90,5	117.456.147	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					103.656.000		105.763.326		108.447.600		111.396.290		115.232.778		
Meningkatnya Data Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah data naskah kuno (Judul)	Judul	0	224	103.656.000	324	105.763.326	374	108.447.600	424	111.396.290	474	115.232.778		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					49.656.000		50.665.506		51.951.397		53.363.956		55.201.810		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	Orang	80	80	49.656.000	80	50.665.506	80	51.951.397	80	53.363.956	80	55.201.810		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					54.000.000		55.097.820		56.496.203		58.032.334		60.030.968		

Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	Eksemplar	1	1	54.000.000	1	55.097.820	1	56.496.203	1	58.032.334	1	60.030.968		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000		2.040.660		2.092.452		2.149.346		2.223.369		
Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan (Judul)	Judul	118	138	2.000.000	148	2.040.660	158	2.092.452	168	2.149.346	178	2.223.369		
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					2.000.000		2.040.660		2.092.452		2.149.346		2.223.369		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Eksemplar	10	10	2.000.000	10	2.040.660	10	2.092.452	10	2.149.346	10	2.223.369		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					13.465.409.501		14.101.465.281		14.087.861.192		14.470.910.138		14.969.288.279		
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.761.249.001		13.382.989.198		13.351.150.185		13.714.167.960		14.186.483.901		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan DPK	Nilai IKM DPK (Predikat)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	12.761.249.001	Sangat Baik	13.382.989.198	Sangat Baik	13.351.150.185	Sangat Baik	13.714.167.960	Sangat Baik	14.186.483.901	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Nilai SPIP DPK (Predikat)	Predikat	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai SAKIP DPK (Predikat)	Predikat	A	A		A		A		A		A			
2.24.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					82.755.500		446.741.920		86.580.954		88.935.090		91.998.015		

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPK	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK (Persen)	Persen	100	100	82.755.500	100	446.741.920	100	86.580.954	100	88.935.090	100	91.998.015		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK (Persen)	Persen	100	100		100		100		100		100			
2.24.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					39.454.000		402.560.100		41.277.800		42.400.143		43.860.404		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	39.454.000	2	402.560.100	2	41.277.800	2	42.400.143	2	43.860.404		
2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					37.596.000		38.360.327		39.333.912		40.403.401		41.794.894		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	37.596.000	1	38.360.327	1	39.333.912	1	40.403.401	1	41.794.894		
2.24.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.140.800		1.163.992		1.193.535		1.225.987		1.268.210		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	1.140.800	1	1.163.992	1	1.193.535	1	1.225.987	1	1.268.210		
2.24.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.195.800		1.220.111		1.251.077		1.285.094		1.329.352		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	1.195.800	1	1.220.111	1	1.251.077	1	1.285.094	1	1.329.352		
2.24.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					466.300		475.780		487.855		501.120		518.379		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	466.300	1	475.780	1	487.855	1	501.120	1	518.379		

2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.387.000		2.435.528		2.497.341		2.565.244		2.653.591		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	2.387.000	1	2.435.528	1	2.497.341	1	2.565.244	1	2.653.591		
2.24.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					515.600		526.082		539.434		554.101		573.185		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	1	515.600	1	526.082	1	539.434	1	554.101	1	573.185		
2.24.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.372.808.429		9.563.357.624		9.806.075.642		10.072.702.838		10.419.606.722		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Nilai	5	5	9.372.808.429	5	9.563.357.624	5	9.806.075.642	5	10.072.702.838	5	10.419.606.722		
2.24.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.367.088.429		9.557.521.337		9.800.091.228		10.066.555.709		10.413.247.887		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	74	74	9.367.088.429	74	9.557.521.337	74	9.800.091.228	74	10.066.555.709	74	10.413.247.887		
2.24.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.960.000		4.040.507		4.143.055		4.255.705		4.402.271		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	3.960.000	12	4.040.507	12	4.143.055	12	4.255.705	12	4.402.271		
2.24.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.100.000		1.122.363		1.150.849		1.182.140		1.222.853		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	1.100.000	12	1.122.363	12	1.150.849	12	1.182.140	12	1.222.853		

2.24.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					110.000		112.236		115.085		118.214		122.285		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	110.000	1	112.236	1	115.085	1	118.214	1	122.285		
2.24.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					330.000		336.709		345.255		354.642		366.856		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	2	2	330.000	2	336.709	2	345.255	2	354.642	2	366.856		
2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					110.000		112.236		115.085		118.214		122.285		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	110.000	12	112.236	12	115.085	12	118.214	12	122.285		
2.24.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					110.000		112.236		115.085		118.214		122.285		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1	1	110.000	1	112.236	1	115.085	1	118.214	1	122.285		
2.24.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					38.910.000		39.701.042		40.708.652		41.815.521		43.255.646		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Nilai	5	5	38.910.000	5	39.701.042	5	40.708.652	5	41.815.521	5	43.255.646		

2.24.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					275.000		280.591		287.712		295.535		305.713		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	275.000	2	280.591	2	287.712	2	295.535	2	305.713		
2.24.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					275.000		280.591		287.712		295.535		305.713		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	275.000	2	280.591	2	287.712	2	295.535	2	305.713		
2.24.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					275.000		280.591		287.712		295.535		305.713		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	275.000	1	280.591	1	287.712	1	295.535	1	305.713		
2.24.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					275.000		280.591		287.712		295.535		305.713		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2	2	275.000	2	280.591	2	287.712	2	295.535	2	305.713		
2.24.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					37.535.000		38.298.087		39.270.092		40.337.846		41.727.081		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2	2	37.535.000	2	38.298.087	2	39.270.092	2	40.337.846	2	41.727.081		
2.24.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					275.000		280.591		287.712		295.535		305.713		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	275.000	1	280.591	1	287.712	1	295.535	1	305.713		
2.24.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					76.714.000		78.273.596		80.260.179		82.442.454		85.281.772		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPK	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK (Nilai)	Nilai	79,23	79,28	76.714.000	79,33	78.273.596	79,38	80.260.179	79,43	82.442.454	79,48	85.281.772		

2.24.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					37.535.000		38.298.087		39.270.092		40.337.846		41.727.081		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	12	12	37.535.000	12	38.298.087	12	39.270.092	12	40.337.846	12	41.727.081		
2.24.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					39.179.000		39.975.509		40.990.087		42.104.608		43.554.691		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen	3	3	39.179.000	3	39.975.509	3	40.990.087	3	42.104.608	3	43.554.691		
2.24.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					329.433.127		336.130.504		344.661.495		354.032.842		366.225.733		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK	Nilai	96,20	96,22	329.433.127	96,23	336.130.504	96,24	344.661.495	96,25	354.032.842	96,26	366.225.733		
2.24.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					31.949.300		32.598.829		33.426.188		34.335.046		35.517.545		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	31.949.300	1	32.598.829	1	33.426.188	1	34.335.046	1	35.517.545		
2.24.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.160.000		33.834.143		34.692.853		35.636.152		36.863.461		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	33.160.000	3	33.834.143	3	34.692.853	3	35.636.152	3	36.863.461		
2.24.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.423.800		18.798.356		19.275.458		19.799.558		20.481.455		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	18.423.800	1	18.798.356	1	19.275.458	1	19.799.558	1	20.481.455		
2.24.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					82.448.880		84.125.066		86.260.160		88.605.574		91.657.150		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	82.448.880	3	84.125.066	3	86.260.160	3	88.605.574	3	91.657.150		

2.24.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					44.070.170		44.966.117		46.107.357		47.361.016		48.992.129		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	44.070.170	1	44.966.117	1	46.107.357	1	47.361.016	1	48.992.129		
2.24.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					230.977		235.673		241.654		248.225		256.774		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	230.977	1	235.673	1	241.654	1	248.225	1	256.774		
2.24.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					119.150.000		121.572.320		124.657.825		128.047.271		132.457.219		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	2	2	119.150.000	2	121.572.320	2	124.657.825	2	128.047.271	2	132.457.219		
2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					68.109.000		69.493.656		71.257.405		73.194.894		75.715.726		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Nilai	5	5	68.109.000	5	69.493.656	5	71.257.405	5	73.194.894	5	75.715.726		
2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					66.590.000		67.943.775		69.668.188		71.562.466		74.027.077		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	0	120	66.590.000	120	67.943.775	120	69.668.188	120	71.562.466	120	74.027.077		
2.24.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.519.000		1.549.881		1.589.217		1.632.428		1.688.649		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	12	12	1.519.000	12	1.549.881	12	1.589.217	12	1.632.428	12	1.688.649		
2.24.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.855.346.295		1.893.065.486		1.941.111.488		1.993.890.309		2.062.559.891		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DPK (Persen)	Persen	100	100	1.855.346.295	100	1.893.065.486	100	1.941.111.488	100	1.993.890.309	100	2.062.559.891		

2.24.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.030.129		1.051.072		1.077.748		1.107.052		1.145.179		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	1.030.129	1	1.051.072	1	1.077.748	1	1.107.052	1	1.145.179		
2.24.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.824.000		4.922.072		5.046.994		5.184.222		5.362.766		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	4.824.000	1	4.922.072	1	5.046.994	1	5.184.222	1	5.362.766		
2.24.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					375.000		382.624		392.335		403.002		416.882		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	375.000	1	382.624	1	392.335	1	403.002	1	416.882		
2.24.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.849.117.166		1.886.709.718		1.934.594.411		1.987.196.033		2.055.635.064		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	8	8	1.849.117.166	8	1.886.709.718	8	1.934.594.411	8	1.987.196.033	8	2.055.635.064		
2.24.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					937.172.650		956.225.370		980.494.370		1.007.154.012		1.041.840.396		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK (Nilai)	Nilai	5	5	937.172.650	5	956.225.370	5	980.494.370	5	1.007.154.012	5	1.041.840.396		
2.24.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					24.471.950		24.969.465		25.603.190		26.299.340		27.205.090		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	24.471.950	1	24.969.465	1	25.603.190	1	26.299.340	1	27.205.090		

2.24.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					219.500.700		223.963.149		229.647.334		235.891.445		244.015.546		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	41	41	219.500.700	41	223.963.149	41	229.647.334	41	235.891.445	41	244.015.546		
2.24.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					7.700.000		7.856.541		8.055.940		8.274.981		8.559.971		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Unit	10	10	7.700.000	10	7.856.541	10	8.055.940	10	8.274.981	10	8.559.971		
2.24.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.500.000		87.238.215		89.452.321		91.884.530		95.049.033		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	88	88	85.500.000	88	87.238.215	88	89.452.321	88	91.884.530	88	95.049.033		
2.24.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					600.000.000		612.198.000		627.735.585		644.803.716		667.010.756		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	3	3	600.000.000	3	612.198.000	3	627.735.585	3	644.803.716	3	667.010.756		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					557.632.300		568.968.965		583.409.397		599.272.299		619.911.235		
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) (Persentase)	Persen	46	54	557.632.300	58	568.968.965	62	583.409.397	66	599.272.299	70	619.911.235	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					93.324.300		95.221.583		97.638.307		100.293.093		103.747.186		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase arsip dinamis yang selesai dikelola (Persen)	Persen	100	100	93.324.300	100	95.221.583	100	97.638.307	100	100.293.093	100	103.747.186		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					13.548.900		13.824.349		14.175.211		14.560.635		15.062.103		

Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	Berkas	2	2	13.548.900	2	13.824.349	2	14.175.211	2	14.560.635	2	15.062.103		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					36.175.400		36.910.846		37.847.643		38.876.721		40.215.635		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	3	3	36.175.400	3	36.910.846	3	37.847.643	3	38.876.721	3	40.215.635		
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis					43.600.000		44.486.388		45.615.453		46.855.737		48.469.448		
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	Unit	1	1	43.600.000	1	44.486.388	1	45.615.453	1	46.855.737	1	48.469.448		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					159.139.000		162.374.296		166.495.355		171.022.364		176.912.374		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis	Persentase arsip statis yang dikelola (Persen)	Persen	65	70	159.139.000	73	162.374.296	76	166.495.355	79	171.022.364	82	176.912.374		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					159.139.000		162.374.296		166.495.355		171.022.364		176.912.374		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	Arsip	500	500	159.139.000	500	162.374.296	500	166.495.355	500	171.022.364	500	176.912.374		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					305.169.000		311.373.086		319.275.735		327.956.842		339.251.675		
Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dientri dalam Simpul JIKN (Arsip)	Arsip	1000	1600	305.169.000	1900	311.373.086	2200	319.275.735	2500	327.956.842	2800	339.251.675		
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					167.618.000		171.025.674		175.366.306		180.134.515		186.338.348		

Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	Pengguna	125	175	167.618.000	200	171.025.674	225	175.366.306	250	180.134.515	275	186.338.348		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					137.551.000		140.347.412		143.909.429		147.822.327		152.913.327		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	2	2	137.551.000	2	140.347.412	2	143.909.429	2	147.822.327	2	152.913.327		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					130.666.500		133.322.950		136.706.687		140.423.741		145.259.935		
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Arsip)	Arsip	5,65	11,31	130.666.500	14,13	133.322.950	16,96	136.706.687	19,79	140.423.741	22,61	145.259.935	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					49.806.500		50.819.066		52.108.854		53.525.694		55.369.119		
Meningkatnya Penyusutan Arsip	Persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku (Persen)	Persen	46	54	49.806.500	58	50.819.066	62	52.108.854	66	53.525.694	70	55.369.119		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					49.806.500		50.819.066		52.108.854		53.525.694		55.369.119		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	Arsip	1.000	1.000	49.806.500	1.000	50.819.066	1.000	52.108.854	1.000	53.525.694	1.000	55.369.119		

2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					14.125.000		14.412.161		14.777.942		15.179.754		15.702.545		
Meningkatnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran	Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK (Persen)	Persen	100	100	14.125.000	100	14.412.161	100	14.777.942	100	15.179.754	100	15.702.545	
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					14.125.000		14.412.161		14.777.942		15.179.754		15.702.545	
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	Daftar	1	1	14.125.000	1	14.412.161	1	14.777.942	1	15.179.754	1	15.702.545	
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					18.860.000		19.243.424		19.731.822		20.268.330		20.966.371	
Meningkatnya Preservasi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi (Arsip)	Arsip	2000	4000	18.860.000	5000	19.243.424	6000	19.731.822	7000	20.268.330	8000	20.966.371	
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					18.860.000		19.243.424		19.731.822		20.268.330		20.966.371	
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	Arsip	500	500	18.860.000	500	19.243.424	500	19.731.822	500	20.268.330	500	20.966.371	
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					47.875.000		48.848.299		50.088.069		51.449.963		53.221.900	

Meningkatnya penelusuran arsip yang dinyatakan hilang	Persentase daftar arsip yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Persen)	Persen	100	100	47.875.000	100	48.848.299	100	50.088.069	100	51.449.963	100	53.221.900		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)					47.875.000		48.848.299		50.088.069		51.449.963		53.221.900		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	Arsip	2	2	47.875.000	2	48.848.299	2	50.088.069	2	51.449.963	2	53.221.900		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					15.861.700		16.184.168		16.594.923		17.046.138		17.633.208		
Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan (Persentase)	Persen	100	100	15.861.700	100	16.184.168	100	16.594.923	100	17.046.138	100	17.633.208	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					15.861.700		16.184.168		16.594.923		17.046.138		17.633.208		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Tertutup	Jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola (Arsip)	Arsip	80	90	15.861.700	95	16.184.168	100	16.594.923	105	17.046.138	110	17.633.208		
2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					15.861.700		16.184.168		16.594.923		17.046.138		17.633.208		
Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	SOP	1	1	15.861.700	1	16.184.168	1	16.594.923	1	17.046.138	1	17.633.208		

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

Dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terhadap program strategis Kepala Daerah terpilih sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	Program Strategis Walikota	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
1.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
				2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
4.	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
				2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, maupun unit kerja lainnya. Berikut ini adalah IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sesuai Rensta 2025-2029.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
2.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks (Skala 0-100)	93,11	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17	
3.	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Indeks (Skala 0-100)	95,45	95,45	95,46	95,47	95,48	95,49	95,5	
4.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Indeks (Skala 0-100)	78,47	78,57	78,67	78,77	78,87	78,97	79,07	
5.	Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi	Nilai	89,82	89,84	89,86	89,88	89,9	89,92	89,94	
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	A	A	A	A	A	AA	AA	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan tertentu. IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	positif	Indeks (Skala 0-100)	93,11	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17	
3.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	positif	Indeks (Skala 0-100)	78,47	78,57	78,67	78,77	78,87	78,97	79,07	
4.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
5.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kerangka pendanaan, serta indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Namun demikian target, rencana kerja, dan pagu indikatif tahun 2030 juga disusun karena program kerja tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Selain itu Renstra disusun dengan memperhatikan responsif gender sehingga diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan kesempatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan, memenuhi kebutuhan informasi, hingga menikmati manfaat dari layanan yang diberikan.

Melalui Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dapat tercapai, dan dapat memberikan kontribusi dampak manfaat yang nyata bagi Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN

1. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip
IK1 : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
IK2: Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal

Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
IK: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca
IK1 : Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
IK2 : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
IK3: Persentase Naskah Nusantara yang didayagunakan

- **Meningkatnya Koleksi Perpustakaan**
  IK : jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
  - **Tersedianya Koleksi Bahan Pustaka**
    IK : jumlah koleksi bahan pustaka yang dilayankan
- **Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan**
  IK : jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi
  - **Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Dibina**
    IK : jumlah peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan yang diadakan
- **Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perpustakaan Berbasis Elektronik**
  IK : persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan
  - **Terselenggaranya Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Dikembangkan**
    IK : Jumlah perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan
  - **Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Sesuai Kewenangan**
    IK : jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan sesuai kewenangan
  - **Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Sesuai Kewenangan**
    IK : jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan
  - **Tersedianya Data Statistik Perpustakaan Tingkat Daerah**
    IK : jumlah Data Statistik Perpustakaan yang tersedia
  - **Tersedianya Data Jumlah Koleksi Terbaca**
    IK : jumlah data koleksi terbaca yang tersedia
- **Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan**
  IK : persentase penambahan Pemustaka
  - **Terselenggaranya Layanan Perpustakaan Umum dan Layanan Rujukan**
    IK : jumlah pemanfaatan layanan perpustakaan
  - **Terlaksananya Pengembangan Layanan Rujukan Perpustakaan**
    IK : jumlah layanan rujukan perpustakaan yang dikembangkan
- **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Baca**
  IK : jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca
  - **Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**
    IK : jumlah lokus kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
  - **Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Kota**
    IK : jumlah peserta Duta Baca tingkat Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya
  - **Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca**
    IK : jumlah kegiatan sosialisasi budaya baca yang diselenggarakan
  - **Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kota**
    IK : jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kota
- **Meningkatnya Data Naskah Kuno yang Dilestarikan**
  IK : jumlah data naskah kuno
  - **Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno**
    IK : jumlah lokus sosialisasi pelestarian naskah kuno
  - **Terlaksananya Pengelolaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan**
    IK : Jumlah Naskah Kuno yang dialihmedia/alih aksara/alih bahasa/alih wahana untuk dilestarikan dan didayagunakan
- **Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara**
  IK : Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan
  - **Terlaksananya Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**
    IK : jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diadakan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip
IK : Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi

- **Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan**
  IK : persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan
  - **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis**
    IK : persentase arsip dinamis yang selesai dikelola
    - **Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan**
      IK : jumlah peningkatan kapasitas SDM kearsipan yang diadakan
    - **Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Sesuai Kewenangan**
      IK : jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis sesuai kewenangan
    - **Terselenggaranya Sarana Prasarana Kearsipan**
      IK : Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis
    - **Terlaksananya Penyusutan Arsip**
      IK : jumlah OPD yang melakukan penyusutan arsip
  - **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis**
    IK : persentase arsip statis yang dikelola
    - **Terselenggaranya Pengolahan Arsip Statis**
      IK : jumlah arsip statis yang diolah
  - **Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)**
    IK : jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dentri dalam Simpul JIKN
    - **Terselenggaranya Layanan Arsip Statis**
      IK : jumlah arsip statis yang dilayankan
- **Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**
  IK : Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan
  - **Meningkatnya Preservasi Arsip Statis**
    IK : Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi
    - **Tercukupinya Sumber Daya Preservasi Arsip**
      IK : jumlah SDM dan sarpras preservasi arsip
  - **Maeningkatnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran**
    IK: Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK
    - **Terlelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah**
      IK: jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah
  - **Meningkatnya penelusuran arsip yang dinyatakan hilang**
    IK: persentase daftar arsip yang telah ditelusuri dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)
    - **Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)**
      IK : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman
  - **Meningkatnya Penyusutan Arsip**
    IK : persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku
    - **Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**
      IK :Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
- **Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup**
  IK : persentase arsip statis tertutup yang didayakan
  - **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Tertutup**
    IK : jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola
    - **Terlaksananya Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup**
      IK : jumlah arsip statis tertutup yang didentifikasi oleh lembaga Kearsipan

Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan adaptif
IK: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
IK : Nilai SAKIP DPK
Nilai SPIP DPK
Nilai IKM DPK

- **Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPK**
  IK: 1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK
  2. Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK
  - **Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
    IK: Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun
  - **Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - **Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - **Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - **Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - **Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - **Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset**
  IK: Nilai Pengusaan Keuangan dan Aset DPK
  - **Terlaksananya administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN**
    IK: Jumlah ASN y ang dikelola gaji dan tunjangannya
  - **Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - **Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - **Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - **Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**
    IK: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
  - **Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - **Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**
    IK: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - **Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**
    IK: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - **Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - **Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
  - **Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - **Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - **Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**
    IK: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - **Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**
    IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainn y a yang Disediakan
  - **Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
    IK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
  - **Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
    IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
  - **Terlaksananya Pemeliharaan Mebel**
    IK: Jumlah Mebel yang Dipelihara
  - **Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
    IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainn y a yang Dipelihara
  - **Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
    IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainn y a yang Dipelihara/Direhabilitasi
- **Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPK**
  IK : Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK
  - **Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**
    IK: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - **Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**
    IK: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- **Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa**
  IK : Persentase Rencana Pengadaan y g dumumkan pd SIRUP DPK
  - **Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
    IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Meny urat
  - **Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
    IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik y ang Disediakan
  - **Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
    IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor y ang Disediakan
  - **Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**
    IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor y ang Disediakan
- **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum**
  IK: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK
  - **Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
    IK: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor y yang Disediakan
  - **Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
    IK: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor y ang Disediakan
  - **Tersedianya Peralatan Rumah Tangga**
    IK: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga y ang Disediakan
  - **Tersedianya Bahan Logistik Kantor**
    IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor y ang Disediakan
  - **Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**
    IK: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan y ang Disediakan
  - **Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
    IK: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan y ang Disediakan
  - **Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
    IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Cross Cutting Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	
BKPSDM	terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan
DINDIKPORA	terselenggaranya pembinaan perpustakaan sekolah SD dan SMP
DP3AP2KB	terselenggaranya kegiatan layanan Perpustakaan Anak
DISKOMINFOSAN	tersedianya data jumlah pengguna internet layanan Perpustakaan

Cross Cutting Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	
BKPSDM	terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
BAGIAN HUKUM	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan
BAGIAN ORGANISASI	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	
BAGIAN HUKUM	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan
BAGIAN ORGANISASI	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PDdanRKPD- Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta PengelolaanAset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

Keterangan:
- Tujuan OPD
- Ultimate Outcome (Sasaran OPD)
- Intermediate Outcome/CSF
- Initial Outcome
- Output (Kinerja Operasional)
- Crosscutting

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip
IK1 : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
IK: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca
IK1 : Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
IK2 : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
IK3: Persentase Naskah Nusantara yang didayagunakan

Meningkatnya Koleksi Perpustakaan
IK : jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan

- **Tersedianya Koleksi Bahan Pustaka**
  IK : jumlah koleksi bahan pustaka yang dilayankan

Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan
IK : jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi

- **Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Dibina**
  IK : jumlah peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan yang diadakan

Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perpustakaan Berbasis Elektronik
IK : persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan

- **Terselenggaranya Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Dikembangkan**
  IK : Jumlah perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan
- **Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Sesuai Kewenangan**
  IK : jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan sesuai kewenangan
- **Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Sesuai Kewenangan**
  IK : jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan
- **Tersedianya Data Statistik Perpustakaan Tingkat Daerah**
  IK : jumlah Data Statistik Perpustakaan yang tersedia
- **Tersedianya Data Jumlah Koleksi Terbaca**
  IK : jumlah data koleksi terbaca yang tersedia

Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan
IK : persentase penambahan Pemustaka

- **Terselenggaranya Layanan Perpustakaan Umum dan Layanan Rujukan**
  IK : jumlah pemanfaatan layanan perpustakaan
- **Terlaksananya Pengembangan Layanan Rujukan Perpustakaan**
  IK : jumlah layanan rujukan perpustakaan yang dikembangkan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Baca
IK : jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca

- **Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**
  IK : jumlah lokus kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
- **Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Kota**
  IK : jumlah peserta Duta Baca tingkat Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya
- **Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca**
  IK : jumlah kegiatan sosialisasi budaya baca yang diselenggarakan
- **Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kota**
  IK : jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kota

Meningkatnya Data Naskah Kuno yang Dilestarikan
IK : jumlah data naskah kuno

- **Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno**
  IK : jumlah lokus sosialisasi pelestarian naskah kuno
- **Terlaksananya Pengelolaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan**
  IK : Jumlah Naskah Kuno yang dialihmedia/alih aksara/alih bahasa/alih wahana untuk dilestarikan dan didayagunakan

Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara
IK : Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan

- **Terlaksananya Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**
  IK : jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diadakan

Cross Cutting Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	
BKPSDM	terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan
DINDIKPORA	terselenggaranya pembinaan perpustakaan sekolah SD dan SMP
DP3AP2KB	terselenggaranya kegiatan layanan Perpustakaan Anak
DISKOMINFOSAN	tersedianya data jumlah pengguna internet layanan Perpustakaan

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip
IK2: Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip
IK : Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi

Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan
IK : persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan

- **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis**
  IK : persentase arsip dinamis yang selesai dikelola
  - **Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan**
    IK : jumlah peningkatan kapasitas SDM kearsipan yang diadakan
  - **Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Sesuai Kewenangan**
    IK : jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis sesuai kewenangan
  - **Terselenggaranya Sarana Prasarana Kearsipan**
    IK : Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis
  - **Terlaksananya Penyusutan Arsip**
    IK : jumlah OPD yang melakukan penyusutan arsip
- **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis**
  IK : persentase arsip statis yang dikelola
  - **Terselenggaranya Pengolahan Arsip Statis**
    IK : jumlah arsip statis yang diolah
- **Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)**
  IK : jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dientri dalam Simpul JIKN
  - **Terselenggaranya Layanan Arsip Statis**
    IK : jumlah arsip statis yang dilayankan

Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
IK : Presentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan

- **Meningkatnya Preservasi Arsip Statis**
  IK : Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi
  - **Tercukupinya Sumber Daya Preservasi Arsip**
    IK : jumlah SDM dan sarpras preservasi arsip
- **Maeningkatnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran**
  IK: Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK
  - **Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah**
    IK: jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah
- **Meningkatnya penelusuran arsip yang dinyatakan hilang**
  IK : persentase daftar arsip yang telah diitetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)
  - **Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)**
    IK : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman
- **Meningkatnya Penyusutan Arsip**
  IK : persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku
  - **Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**
    IK :Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup
IK : persentase arsip statis tertutup yang dilayankan

- **Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Tertutup**
  IK : jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola
  - **Terlaksananya Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup**
    IK : jumlah arsip statis tertutup yang diidentifikasi oleh lembaga Kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	
BKPSDM	terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
BAGIAN HUKUM	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan
BAGIAN ORGANISASI	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan

Cross Cutting Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	
BAGIAN HUKUM	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan
BAGIAN ORGANISASI	terlaksananya penyusunan tata naskah dinas dan pedoman kearsipan

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip
IK2: Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal

Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan adaptif
IK: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
IK : Nilai SAKIP DPK
Nilai SPIP DPK
Nilai IKM DPK

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPK
IK: 1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK
2. Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK

- **Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
  IK: Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun
- **Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- **Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- **Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- **Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- **Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset
IK: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK

- **Terlaksananya administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN**
  IK: Jumlah ASN yang dikelola gaji dan tunjangannya
- **Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- **Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- **Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**
  IK: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
- **Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**
  IK: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- **Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**
  IK: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- **Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- **Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- **Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**
  IK: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- **Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**
  IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- **Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
  IK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- **Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
  IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- **Terlaksananya Pemeliharaan Mebel**
  IK: Jumlah Mebel yang Dipelihara
- **Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- **Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
  IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPK
IK : Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK

- **Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**
  IK: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- **Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**
  IK: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa
IK : Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP DPK

- **Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
  IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- **Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
  IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- **Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
  IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- **Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**
  IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum
IK: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK

- **Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
  IK: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- **Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
  IK: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- **Tersedianya Peralatan Rumah Tangga**
  IK: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- **Tersedianya Bahan Logistik Kantor**
  IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- **Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**
  IK: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- **Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
  IK: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- **Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
  IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Cross Cutting Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PDdanRKPD- Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta PengelolaanAset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target				
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa dijenjangkan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip	1) Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2024. Nilai IPLM dihitung dari penjumlahan pengukuran rasio 7 komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi komponen Aspek Masyarakat (AM) dikali 100 $IPLM = \sum_{i} \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Keterangan: UPLMi = variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat AM: jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakan	93.12	93.13	93.14	93.15	93.16
			2) Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal yaitu Hasil penilaian kearsipan Perangkat Daerah (40%) + LKD (60%)	95.45	95.46	95.47	95.48	95.49

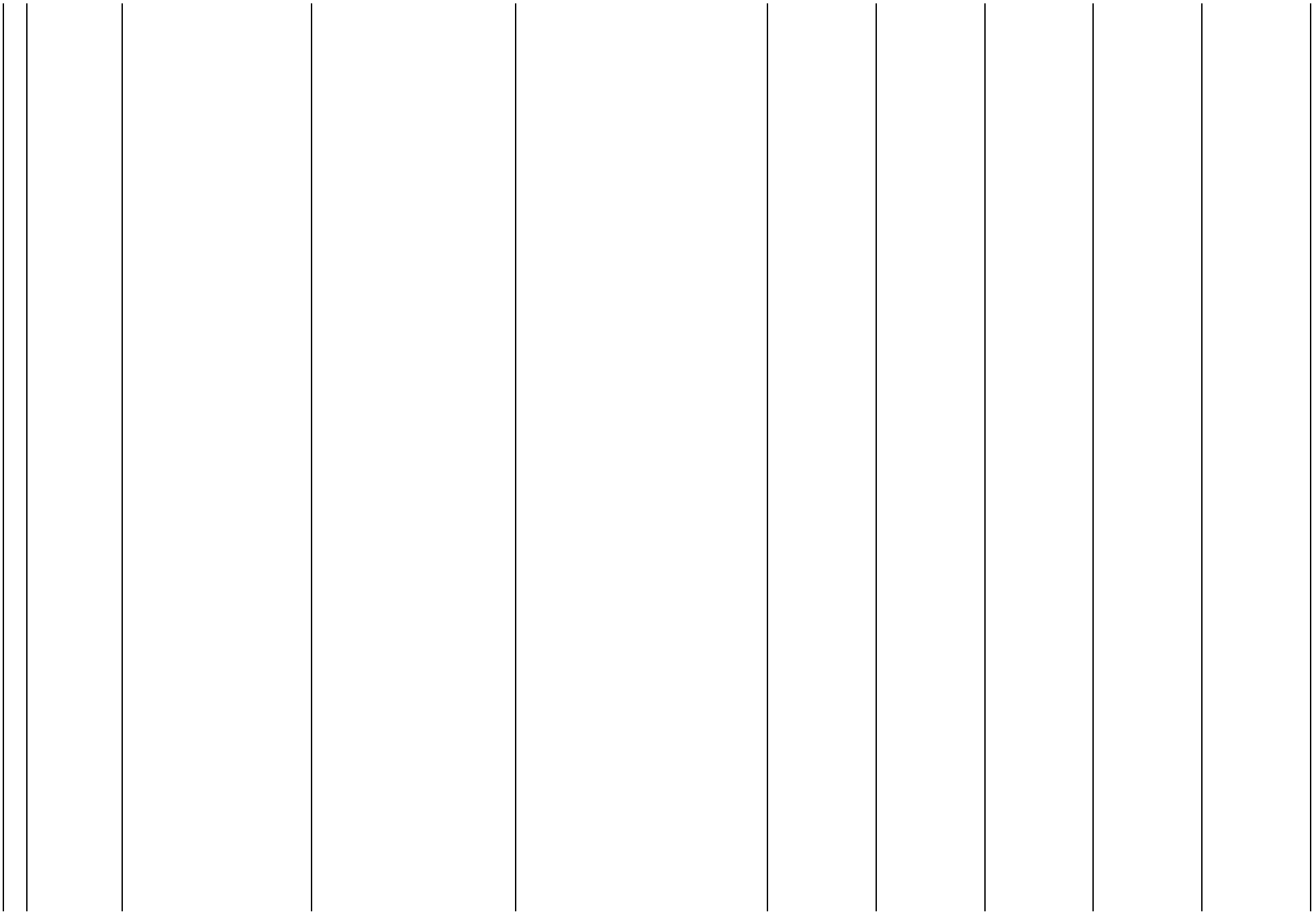

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target				
Tulis Sasaran Stratagis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Stratagis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai TGM dihitung dari penjumlahan lima (5) dimensi dengan perkalian angka tertentu pada masing-masing dimensi TGM = (0.3FM + 0.3DM + 0.3JB) + (0.05FAI + 0.05DAI) FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JB = Jumlah Bahan Bacaan FAI = Frekuaensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet	78.57	78.67	78.77	78.87	78.97
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi	Nilai rata-rata Unit Kearsipan (UK) + nilai rata-rata Unit Pengolah (UP) dibagi 2 Hasil verifikasi provinsi	89,84	89,86	89,88	89,90	89,92

Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat	A (88,12 - 90)	A (88,62 - 90)	A (89,12 - 90)	A (89,62 - 90)	AA (90,12 - 93)

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target				
Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah perpustakaan SD dan SMP sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi jumlah keseluruhan perpustakaan SD dan SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan	41.82%	44.09%	46.36%	48.64%	50.91%
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	indeks kepuasan layanan perpustakaan dihitung berdasarkan nilai survei kepuasan masyarakat Pemustaka (SKM Pemustaka) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari 9 indikator pelayan yaitu persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, alur layanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, penanganan prosedur, dan sarana prasarana	Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca	83.97	84.47	84.97	85.47	85.97
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan	naskah kuno yang dialihmedia/alih aksara/alih bahasa dibagi naskah kuno yang dimiiki dikali 100%	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan	33.94%	45.25%	56.56%	67.87%	79.19%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan	jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan dibagi jumlah keseluruhan OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta dikali 100%	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	50%	54%	58%	62%	66%

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	presentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi) dibagi arsip statis dikali 100%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	8.48%	11.31%	14.13%	16.96%	19.79%
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan	jumlah arsip statis tertutup yang selesai dikelola oleh lembaga Kearsipan dibagi jumlah arsip statis tertutup yang masuk dikali 100%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan DPK	1) Nilai SAKIP DPK 2) Nilai SPIP DPK 3) Nilai IKM DPK	1) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 2) Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat 3) Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretaris DPK	1) A 2) Terkelola dan Terukur 3) Baik	1) A 2)Terkelola dan Terukur 3) Sangat Baik	1) A 2) Terkelola dan Terukur 3) Sangat Baik	1) A 2) Terkelola dan Terukur 3) Sangat Baik	1) A 2) Terkelola dan Terukur 3) Sangat Baik

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target				
Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Seksi Yang mengampu indikator kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koleksi Perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	jumlah penambahan judul bahan pustaka yang dikembangkan (akumulasi)	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan	38677	39477	40277	41077	41877
	Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi	jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan perpustakaan atau pendidikan non perpustakaan ditambah pelatihan perpustakaan)	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan	141	171	201	231	261
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perpustakaan Berbasis Elektronik	persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan	Jumlah Perpustakaan umum, khusus, dan sekolah yang sudah menerapkan otomasi dibagi jumlah Perpustakaan umum, khusus, dan sekolah dikali 100%	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan	31.51%	34.73%	37.94%	41.16%	44.37%
	Meningkatnya Pemanfataan Perpustakaan	persentase penambahan Pemustaka	jumlah pemustaka n tahun dikurangi n-1 dibagi jumlah pemustaka n-1 dikali 100%	Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan budaya baca	jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca	jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca	Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca	3200	3400	3600	3800	4000
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Data Naskah Kuno yang Dilestarikan	jumlah data naskah kuno	jumlah judul dalam katalog naskah kuno (GANTARI)	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka, Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi	224	274	324	374	424
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan	Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka, Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi	128	138	148	158	168
Pengeloaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	persentase arsip dinamis yang selesai dikelola	jumlah arsip dinamis yang selesai dikelola dibagi jumlah seluruh arsip dinamis dikali 100%	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dientri dalam Simpul JIKN	jumlah arsip statis yang sudah diolah menjadi daftar arsip statis dan inventaris yang siap diinput dalam sistem SIKN JIKN (akumulasi)	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	1300	1600	1900	2200	2500

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis	persentase arsip statis yang dikelola	jumlah arsip statis yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip statis dikali 100%	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	68%	70%	73%	76%	79%
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Meningkatnya Preservasi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi	jumlah arsip statis yang dialihmediakan dan direstorasi (akumulasi)	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	3000	4000	5000	6000	7000
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Meningkatnya Penyusutan Arsip	persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku	Jumlah OPD yang telah melakukan penyusutan arsip dibagi jumlah seluruh OPD di Pemkot Yogyakarta dikali 100%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	50%	54%	58%	62%	66%
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Maeningkatnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran	Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran sesuai NSPK	Jumlah daftar arsip yang diselamatkan dari penggabungan dan/atau pembubaran dan pemekaran perangkat daerah sesuai NSPK dibagi Jumlah daftar arsip yang diselamatkan dari penggabungan, pemekaran, dan pembubaran perangkat daerah dikali 100%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Meningkatnya penelusuran arsip yang dinyatakan hilang	persentase daftar arsip yang telah diitetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Daftar arsip yang telah diitetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dibagi Daftar pencarian arsip yang diumumkan dikali 100%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Tertutup	jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola	jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola hingga tercipta daftar arsip statis tertutup siap untuk dilayankan	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan		90	95	100	105
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja DPK	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK yang wajib disusun	Ketua Tim Kerja PEP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan data statistik sectoral DPK	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	Ketua Tim Kerja PEP	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPK oleh BPKAD	Kasubbag Keuangan	5	5	5	5	5
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPK oleh BPKAD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	5	5	5	5	5

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPK oleh BPKAD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	5	5	5	5	5
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	Hasil penilaian pengelolaan keuangan DPK oleh BPKAD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	5	5	5	5	5
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai DPK	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK	Hasil nilai IP ASN DPK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	79.23	79.28	79.33	79.38	79.43
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DPK	Jumlah belanja DPK yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA DPK dikali 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	96.21	96.22	96.23	96.24	96.25

Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target				
Tulis Nama Subkegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Seksi/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Tersedianya Koleksi Bahan Pustaka	jumlah koleksi bahan pustaka yang dilayankan	Tim Kerja Pengembangan Bahan Pustaka	1000 eksemplar	1000 eksemplar	1000 eksemplar	1000 eksemplar	1000 eksemplar
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Dibina	jumlah peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan yang diadakan	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terselenggaranya Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Dikembangkan	Jumlah perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Sesuai Kewenangan	jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan sesuai kewenangan	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	8 perpustakaan	8 perpustakaan	8 perpustakaan	8 perpustakaan	8 perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Sesuai Kewenangan	jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Tersedianya Data Statistik Perpustakaan Tingkat Daerah	jumlah Data Statistik Perpustakaan yang tersedia	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	jumlah data koleksi terbaca yang tersedia	Tim Kerja Pembinaan Perpustakaan, Data, dan Sistem Informasi Perpustakaan	-	19500 Eksemplar	20000 Eksemplar	20500 Eksemplar	21000 Eksemplar
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Perpustakaan Umum dan Layanan Rujukan	jumlah pemanfaatan layanan perpustakaan	Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan	2 perpustakaan
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Rujukan Perpustakaan	jumlah layanan rujukan perpustakaan yang dikembangkan	Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terselenggaranya kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	jumlah lokus kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Tim Kerja Pengembangan Budaya Gemar Membaca	10 perpustakaan	10 perpustakaan	10 perpustakaan	10 perpustakaan	10 perpustakaan
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Kota	jumlah peserta Duta Baca tingkat Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	Tim Kerja Pengembangan Budaya Gemar Membaca	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca	jumlah kegiatan sosialisasi budaya baca yang diselenggarakan	Tim Kerja Pengembangan Budaya Gemar Membaca	3 lokus	3 lokus	3 lokus	3 lokus	3 lokus
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kota	jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kota	Tim Kerja Pengembangan Budaya Gemar Membaca	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno	jumlah lokus sosialisasi pelestarian naskah kuno	Tim Kerja Pengembangan Bahan Pustaka	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengelolaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dialihmedia/alih aksara/alih bahasa/alih wahana untuk dilestarikan dan didayagunakan	Tim Kerja Pengembangan Bahan Pustaka	-	1 eksemplar	1 eksemplar	1 eksemplar	1 eksemplar
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diadakan	Tim Kerja Pengembangan Bahan Pustaka	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan	jumlah peningkatan kapasitas SDM kearsipan yang diadakan	Tim Kerja Pengembangan Kearsipan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Sesuai Kewenangan	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis sesuai kewenangan	Tim Kerja Pengelolaan Arsip	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Terselenggaranya Sarana Prasarana Kearsipan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Tim Kerja Pengelolaan Arsip	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Terselenggaranya Layanan Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilayankan	Tim Kerja Pengembangan Kearsipan	150 pengguna	175 pengguna	200 pengguna	225 pengguna	250 pengguna

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terselenggaranya Pengolahan Arsip Statis	jumlah arsip statis yang diolah	Tim Kerja Pengelolaan Arsip	500 arsip	500 arsip	500 arsip	500 arsip	500 arsip
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tercukupinya Sumber Daya Preservasi Arsip	jumlah SDM dan sarpras preservasi arsip	Tim Kerja Pembinaan Kearsipan Data dan Sistem Informasi Kearsipan	500 arsip	500 arsip	500 arsip	500 arsip	500 arsip
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penyusutan Arsip	jumlah OPD yang melakukan penyusutan arsip	Tim Kerja Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1000 arsip	1000 arsip	1000 arsip	1000 arsip	1000 arsip
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Tim Kerja Pengelolaan Arsip	2 berkas	2 berkas	2 berkas	2 berkas	2 berkas
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Tim Kerja Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 daftar	1 daftar	1 daftar	1 daftar	1 daftar
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	Tim Kerja Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2 arsip	2 arsip	2 arsip	2 arsip	2 arsip
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup	jumlah arsip statis tertutup yang diidentifikasi oleh lembaga Kearsipan	Tim Kerja Pembinaan Kearsipan Data dan Sistem Informasi Kearsipan	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian Keuangan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Bagian Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Bagian Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Bagian Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Bagian Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Bagian Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	88 Unit	88 Unit	88 Unit	88 Unit	88 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RESTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS PARIWISATA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (3) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2) : Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta bagi pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, usaha jasa pariwisata dan pihak-pihak lainnya. Diharapkan, dokumen ini dapat memberikan arah dan strategi yang jelas dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Pariwisata untuk periode Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah serta masyarakat Kota Yogyakarta mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata selama periode Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga dapat dijadikan pedoman utama bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Wahyu Hendratmoko, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741102 199803 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **III**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **5**
2.1. Struktur Organisasi 5
2.2. Tugas dan Fungsi 5
2.3. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 11
2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana 12
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.6. Penentuan Isu-isu Strategis 15
2.7. Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **27**
3.1. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; 27
3.2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; 27
3.3. Strategi Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029; 28
3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; 29
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **31**
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 31
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 35
4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 49
4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 50
BAB V PENUTUP **52**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Susunan Pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 12
Tabel 2. 2 Daftar Inventaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 12
Tabel 2. 3 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 18
Tabel 2. 4 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024..... 23
Tabel 2. 5 Pencapaian Sasaran Program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024..... 24
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 28
Tabel 3. 2 Penyandingan Visi, Misi, Strategi & Arah Kebijakan..... 29
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 29
Tabel 4. 1 Target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 32
Tabel 4. 2 Target Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata 33
Tabel 4. 3 Target Program Pemasaran Pariwisata..... 33
Tabel 4. 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif..... 34
Tabel 4. 5 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 35
Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 44
Tabel 4. 7 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 49
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 51
Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal luas dengan berbagai predikat, salah satunya sebagai Kota Wisata. Julukan ini mencerminkan kekayaan dan keberagaman destinasi pariwisata yang dimiliki Kota Yogyakarta, meliputi wisata budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, religi, buatan hingga belanja. Keanekaragaman potensi wisata tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan daerah berbasis pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pembangunan pariwisata yang terarah dan berdampak, diperlukan perencanaan yang komprehensif, strategis, serta berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Renstra disusun berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman kerja bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di lingkungan perangkat daerah.

Penyusunan Renstra merupakan mandat dari beberapa regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah wajib menyusun dan menetapkan Perda RPJMD sebagai penjabaran dari RPJPD. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 mengamanatkan agar RPJMD disusun selaras dengan RPJPD dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, yang memuat misi pembangunan nasional (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan pada (Pasal 15) yaitu dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Dokumen Renstra selanjutnya akan diverifikasi keselarasan rancangan Renstra terhadap rancangan awal RPJMD oleh Bappeda.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta ke dalam arah kebijakan dan program konkret di bidang kepariwisataan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang efektif dan terukur bagi seluruh

pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, maupun mitra strategis lainnya, dalam mendukung kemajuan pariwisata Kota Yogyakarta pada periode lima tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Kota Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Lampiran XIV).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ialah sebagai pedoman dan dokumen perencanaan untuk periode 2025-2029 bagi para pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, usaha jasa pariwisata dan pihak-pihak lainnya dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota Yogyakarta ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan sektor pariwisata selama periode 2025–2029.
2. Merumuskan perencanaan tahunan seperti program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut penyusunan penganggaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta periode 2025-2029.
3. Menetapkan prioritas program disertai dengan pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029.
4. Menjadikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terkhusus periode 2025-2029.

5. Mendorong sinergi antara Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

2.1. Struktur Organisasi

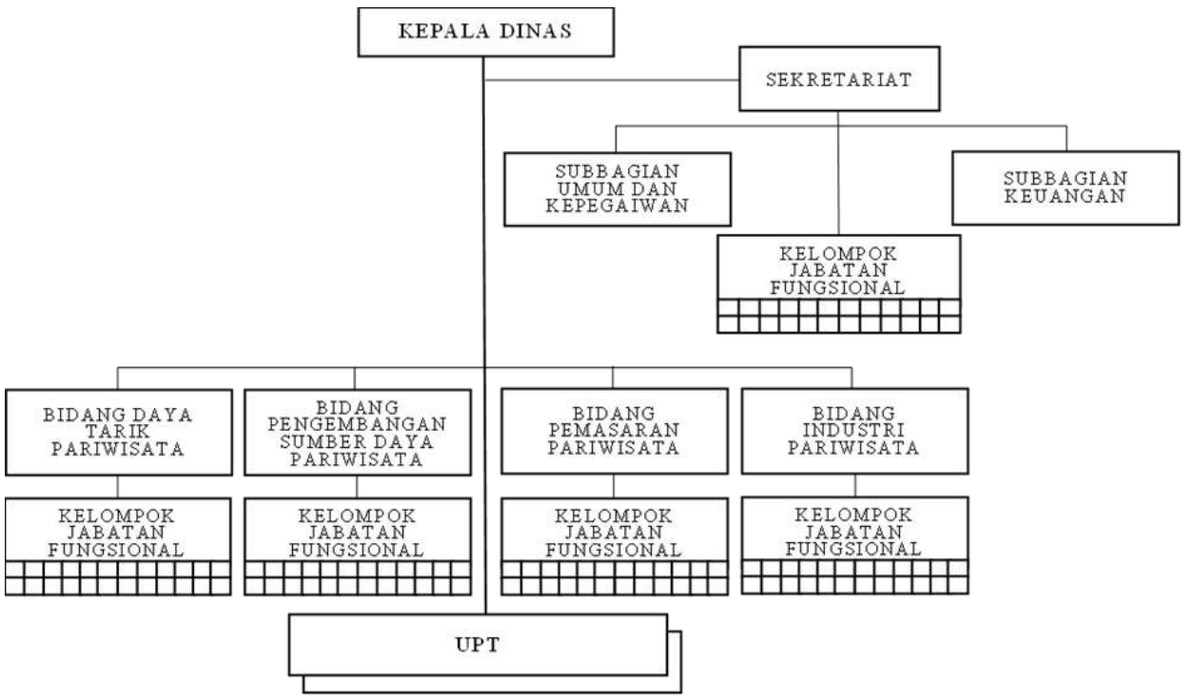

2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi dinas;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
h. Penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional dinas;
k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi dinas;
l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dinas;
n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dinas.

A. Sekretariat

1. Sekretaris

   Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. Pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
   b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
   c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
   d. Membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
   f. Pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
   g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
   h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
   i. Pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
   j. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
   k. Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
   l. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;
   m. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
   n. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
   o. Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
   p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
   q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan

fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
e. Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
f. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
g. Penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
h. Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
k. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
l. Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
m. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
o. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
c. Penatausahaan keuangan Dinas;
d. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;

f. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
g. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h. Pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Bidang Daya Tarik Wisata

Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik pariwisata;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
d. Pengembangan daya tarik pariwisata;
e. Penetapan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi daya tarik pariwisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
f. Pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
g. Pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
h. Pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
i. Pembinaan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
j. Pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
k. Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
l. Pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang daya tarik pariwisata;
m. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
n. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;

o. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
p. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
q. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada pada Bidang Daya Tarik Pariwisata; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya pariwisata;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
e. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
f. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
g. Fasilitasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
h. pemberdayaan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
i. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
j. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata melalui jejaring kemitraan pariwisata;
k. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
l. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
n. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

D. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
d. Kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
e. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pengembangan sumber daya pariwisata daerah;
f. Kerjasama dan kemitraaan pariwisata dalam rangka promosi pariwisata;
g. Misi promosi dan kerjasama pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
h. Fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
i. Pelayanan informasi pariwisata;
j. Pengelolaan website sistem informasi pariwisata;
k. Analisa pasar wisatawan;
l. Meningkatkan dan pengembangan pencitraan (branding) pariwisata;
m. Pengoordinasian fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
n. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
o. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
p. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
q. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
r. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

E. Bidang Industri Pariwisata

Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program di bidang Industri Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
d. Pembinaan industri pariwisata;
e. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha jasa pariwisata;
f. Pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang usaha jasa pariwisata;
g. Pengawasan industri pariwisata;
h. Monitoring dan evaluasi industri pariwisata;
i. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
j. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
l. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
m. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.3. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Struktur kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2025 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 30 pegawai, yang terdiri dari 30 orang PNS, 3 orang Non PNS (tenaga bantuan & tenaga teknis). Berikut susunan pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Tabel 2. 1 Susunan Pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Jenis Kelamin		Eselon/JFT		Pendidikan		Pangkat/Gol		Status	
Laki-Iaki	: 13	Eselon II a	: -	SD	: -	Gol II/a	: -	Kawin	: 25
Perempuan	: 20	Eselon II b	: 1	SMP	: -	Gol II/b	: -	Belum	: 8
Jumlah	: 33	Eselon III a	: 1	SLTA	: 2	Gol II/c	: 3	Janda	: -
		Eselon III b	: 4	D-III	: 7	Gol II/d	: 3	Jumlah	: 33
		Eselon IV a	: 1	D-IV	: 1	Gol III/a	: 4		
		JFT	: -	S-1	: 12	Gol III/b	: 2		
		Jumlah	: 7	S-2	: 11	Gol III/c	: 3		
				Jumlah	: 33	Gol III/d	: 3		
						Gol IV/a	: 9		
						Gol IV/b	: 1		
						Gol IV/c	: 1		
						Naban	: 3		
						Jumlah	: 33		

Kondisi kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sudah cukup baik, jika ditinjau dari sisi jenjang pendidikan formal. Meski demikian, masih dirasa perlu untuk meningkatkan wawasan aparatur lingkup Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, karena latar belakang pendidikan di bidang pariwisata masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Sedangkan berdasarkan analisis beban kerja jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan peningkatan kompetensinya.

2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta saat ini menempati bangunan bersejarah bekas rumah Jenderal Urip Sumohardjo sekaligus akhir rute gerilya Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Suroto 11 Kotabaru Yogyakarta. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang penting serta termasuk bangunan cagar budaya. Lokasinya juga mudah dijangkau karena aksesibilitas transportasinya mudah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Data sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Daftar Inventaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/UNIT
1	Portable Generating Set	1
2	Pompa Air	3
3	Station Wagon	4
4	Sepeda Motor	7
5	*Thermohygrometer* (Alat Ukur Universal)	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/UNIT
6	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1
7	Lemari Besi/Metal	1
8	Lemari Kayu	8
9	Rak Besi	10
10	Rak Kayu	8
11	Filing Cabinet Besi	18
12	Lemari Sorok	2
13	Papan Visual/Papan Nama	323
14	White Board	3
15	Alat Penghancur Kertas	1
16	Lcd Projector/*Infocus*	4
17	Papan Gambar	49
18	Meubelair	6
19	Meja Kerja Besi/Metal	1
20	Meja Kerja Kayu	11
21	Kursi Besi/Metal	10
22	Sice	3
23	Meja Rapat	13
24	Meja Resepsionis	2
25	Meja Bundar	1
26	Meja 1/2 Biro	17
27	Kursi Rapat	60
28	Kursi Putar	22
29	Kursi Lipat	12
30	Meja Komputer	3
31	Sofa	2
32	Alat Pendingin	2
33	A.C. Split	12
34	Kipas Angin	8
35	Wastafel Portabel	2
36	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sabung Dinding)	1
37	Alat Rumah Tangga Lainnya (Vertical Blind)	1
38	Alat Rumah Tangga Lainnya (Wastafel)	46
39	Alat Rumah Tangga Lainnya (Wastafel Portabel)	1
40	Alat Rumah Tangga Lainnya (Pit Stop)	10
41	Televisi	4
42	Amplifier	1
43	Loudspeaker	7
44	Sound System	1
45	Microphone	3
46	Microphone Floor Stand	1
47	Unit Power Supply/Ups	4
48	Camera Video	1
49	Camera Film	3
50	Tiang Bendera	1
51	Tangga Aluminium	1
52	Dispenser	6
53	Vertikal Blind	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/UNIT
54	Tangga	2
55	Alat Pemadam/Portable	8
56	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	6
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	2
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	5
59	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil G	14
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1
61	Peralatan Studio Audio	1
62	Audio Visual	9
63	Microphone/Wireless Mic	1
64	Off Air Tv Monitor	1
65	Tripod Camera	3
66	Lensa Kamera	2
67	Camera Digital	2
68	Tas Kamera	2
69	Telephone (PABX)	1
70	Pesawat Telephone	9
71	Telephone Mobile	2
72	Telepon Analog	1
73	Alat Kedokteran Umum (*Thermogun*)	38
74	P.C Unit	34
75	Lap Top	9
76	Note Book	7
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19
78	External/ Portable Hardisk	4
79	Uninterupted Power Supply (Ups)	20
80	Filing Cabinet Besi	1
81	Kursi Lipat	1
82	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1
83	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inci)	1
84	Tabung Gas	1
85	Pompa Air	1
86	Mesin Fogging	1
87	Audio Visual	1
88	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1
89	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1
90	P.C Unit	1
91	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
92	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1
94	Bangunan Tempat Parkir	1
95	Software Aplikasi E-Booking Kampung Wisata	1
96	Kajian	7

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang dapat menghambat tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah:

1. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam pelestarian lingkungan, sehingga kegiatan pariwisata masih menimbulkan permasalahan lingkungan di Yogyakarta. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan, dikhawatirkan akan semakin bertambah pula permasalahan lingkungan yang ada di destinasi wisata, tempat perbelanjaan, sentra kuliner dan souvenir, termasuk pula di area penyelenggaraan event. Selain itu, keterbatasan ruang publik juga menjadi kendala tersendiri dalam penyelenggaraan event, terlebih lagi Kota Yogyakarta masih perlu menambah atraksi/event pada malam hari.
2. Ruang lingkup promosi di kancah internasional masih terbatas. Hal ini mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Yogyakarta. Selain itu diperlukan akses transportasi yang memadai, serta publikasi informasi secara masif dari berbagai platform.
3. Kota Yogyakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi kota ini, terutama dalam menghadapi persaingan dengan destinasi wisata lain yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan, serta meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan Meta Ads, kita dapat mengatasi permasalahan ini dan mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan.
4. Di era persaingan pariwisata yang kian sengit, Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Mereka yang tertinggal dalam inovasi dan pengembangan diri akan kesulitan untuk berkontribusi secara signifikan dalam memajukan industri yang dinamis ini.
5. Potensi besar kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat masih terpendam, terhambat oleh pengelolaan yang belum sepenuhnya profesional. Optimalisasi tata kelola yang lebih modern dan terstruktur akan membuka pintu bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih signifikan dan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
6. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur kewenangan pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) berbasis risiko usaha, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap UJP dengan skala risiko menengah rendah dan rendah. Mengingat konsentrasi signifikan, yakni sekitar 80%, industri pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) berpusat di Kota Yogyakarta, maka terdapat implikasi strategis terkait keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara komprehensif terhadap keseluruhan lanskap industri pariwisata di wilayahnya sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

2.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis yang teridentifikasi pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dengan fokus pada perubahan sistem, pola pikir, dan budaya kerja birokrasi agar sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berupaya mewujudkan organisasi birokrasi yang efisien dan efektif pada sistem, proses, dan prosedur kerja dalam birokrasi, dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan fungsi, melalui peningkatan profesionalisme aparatur.

2. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata menuju destinasi pariwisata premium yang menonjolkan *hospitality* dan pemenuhan standar industri/global. Destinasi pariwisata dikembangkan tidak hanya menjadi menarik tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kenyamanan wisatawan menjadi acuan dalam pengembangan inovasi pelayanan dengan mengarah pada minat wisata hijau melalui pengelolaan sanitasi dan sampah yang paripurna. Penguatan kualitas atraksi wisata dengan menyediakan berbagai alternatif atraksi wisata yang bersifat seni budaya tradisional, kontemporer, kekinian dan akulturasi untuk memantik keinginan wisatawan berkunjung kembali ke Kota Yogyakarta.
3. Semakin berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta maka diperlukan media promosi yang lebih luas. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan promosi ke luar negeri untuk menyasar wisatawan mancanegara yang lebih banyak. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan destinasi Yogyakarta di kancah internasional. Masih kurangnya promosi di luar negeri, keterbatasan dalam melaksanakan promosi di luar Kota Yogyakarta masih belum sebanding dengan tuntutan untuk mendatangkan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang semakin tinggi serta lahirnya variasi destinasi wisata di Yogyakarta.
4. Menggunakan promosi berbayar (paid promote) seperti menggunakan Meta Ads dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Yogyakarta melalui iklan yang menarik dan efektif. Dengan memanfaatkan platform periklanan digital yang luas dan canggih, kita dapat menjangkau audiens yang spesifik dan relevan melalui Facebook, Instagram, dan Audience Network. Kita dapat membuat iklan yang menarik dengan berbagai format, seperti gambar, video, dan carousel, serta menggunakan targeting yang tepat untuk mencapai target audiens yang diinginkan, sehingga meningkatkan efektivitas iklan dan mencapai hasil yang diinginkan.
5. Dalam visi pengembangan pariwisata yang berjangka panjang, prioritas utama adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Hal ini esensial untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
6. Penguatan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat, menuju pengelolaan yang profesional dan mandiri, adalah langkah fundamental dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kemandirian pengelolaan, masyarakat lokal akan memiliki peran yang lebih aktif dan signifikan dalam menikmati manfaat dari potensi pariwisata di wilayah mereka.
7. Penurunan signifikan tingkat hunian hotel, yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan restriksi kegiatan *study tour* di sejumlah provinsi, menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan operasional perhotelan, berpotensi mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, serta menggerus secara substansial Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penurunan

penerimaan pajak hotel dan restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor usaha pariwisata, dan retribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari entitas perhotelan. Dalam konteks kerentanan ini, implementasi standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi imperatif strategis bagi industri pariwisata untuk memperkuat resiliensi, memberikan pelayanan prima yang adaptif terhadap perubahan, dan memitigasi dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.

8. Yogyakarta sebagai City of Festival telah dihidupi oleh para penggerak dan penggagas festival untuk memfasilitasi dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam Kota penyelenggaraan festival di Yogyakarta. Termasuk dalam membangun ekosistem festival yang meliputi: manajemen dan produksi, mulai dari bagaimana membangun standar kualitas penyelenggaraan festival, hingga strategi pengelolaan program dalam sebuah festival serta *impact* positif di bidang ekonomi, kebudayaan dan lingkungan dalam menjaga keberlanjutannya (*sustainability*). Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Festival adalah upaya bersama untuk mendorong penguatan posisi Yogyakarta sebagai kota kreatif kelas dunia.

Tabel 2. 3 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Kurangnya kesadaran wisatawan dalam pelestarian lingkungan, sehingga kegiatan pariwisata masih menimbulkan permasalahan lingkungan di Yogyakarta. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan, dikhawatirkan akan semakin bertambah pula permasalahan lingkungan yang ada di destinasi wisata, tempat perbelanjaan, sentra kuliner dan suvenir, termasuk pula di area penyelenggaraan event. Selain itu, keterbatasan ruang publik juga menjadi kendala tersendiri dalam penyelenggaraan event, terlebih lagi Kota Yogyakarta masih perlu menambah atraksi/event pada malam hari.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dengan fokus pada perubahan sistem, pola pikir, dan budaya kerja birokrasi agar sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berupaya mewujudkan organisasi birokrasi yang efisien dan efektif pada sistem, proses, dan prosedur kerja dalam birokrasi, dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan fungsi, melalui peningkatan profesionalisme aparatur.
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Ruang lingkup promosi di kancah internasional masih terbatas. Hal ini mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Yogyakarta. Selain itu diperlukan akses transportasi yang memadai, serta publikasi informasi secara masif dari berbagai platform.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata menuju destinasi pariwisata premium yang menonjolkan *hospitality* dan pemenuhan standar industri/global. Destinasi pariwisata dikembangkan tidak hanya menjadi menarik tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kenyamanan wisatawan menjadi acuan dalam pengembangan inovasi pelayanan dengan mengarah pada minat wisata hijau melalui pengelolaan sanitasi dan sampah yang paripurna. Penguatan kualitas atraksi wisata dengan menyediakan berbagai alternatif atraksi wisata yang bersifat seni budaya tradisional, kontemporer, kekinian dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						akulturasi untuk memantik keinginan wisatawan berkunjung kembali ke Kota Yogyakarta.
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Kota Yogyakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi kota ini, terutama dalam menghadapi persaingan dengan destinasi wisata lain yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan, serta meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan Meta Ads, kita dapat mengatasi permasalahan ini dan mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Semakin berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta maka diperlukan media promosi yang lebih luas. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan promosi ke luar negeri untuk menyasar wisatawan mancanegara yang lebih banyak. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan destinasi Yogyakarta di kancah internasional. Masih kurangnya promosi di luar negeri, keterbatasan dalam melaksanakan promosi di luar Kota Yogyakarta masih belum sebanding dengan tuntutan untuk mendatangkan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang semakin tinggi serta lahirnya variasi destinasi wisata di Yogyakarta.
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Di era persaingan pariwisata yang kian sengit, Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Mereka yang tertinggal dalam inovasi dan pengembangan diri akan kesulitan untuk berkontribusi secara signifikan dalam memajukan industri yang dinamis ini.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Menggunakan promosi berbayar (paid promote) seperti menggunakan Meta Ads dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Yogyakarta melalui iklan yang menarik dan efektif. Dengan memanfaatkan platform periklanan digital yang luas dan canggih, kita dapat menjangkau audiens yang spesifik dan relevan melalui Facebook, Instagram, dan Audience Network. Kita dapat membuat iklan yang menarik dengan berbagai format, seperti gambar, video, dan carousel, serta menggunakan targeting yang tepat untuk mencapai target audiens yang diinginkan, sehingga meningkatkan efektivitas iklan dan mencapai hasil yang diinginkan.
Meningkatnya Perekonomian	Potensi besar kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat masih terpendam, terhambat oleh pengelolaan yang belum	Bappeda secara langsung		Pembangunan Pariwisata yang	Sumbu Filosofi Yogyakarta	Dalam visi pengembangan pariwisata yang berjangka panjang, prioritas utama adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	sepenuhnya profesional. Optimalisasi tata kelola yang lebih modern dan terstruktur akan membuka pintu bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih signifikan dan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.	tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		berkualitas dan berkelanjutan	sebagai warisan budaya	(SDM) pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Hal ini esensial untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur kewenangan pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) berbasis risiko usaha, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap UJP dengan skala risiko menengah rendah dan rendah. Mengingat konsentrasi signifikan, yakni sekitar 80%, industri pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) berpusat di Kota Yogyakarta, maka terdapat implikasi strategis terkait keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara komprehensif terhadap keseluruhan lanskap industri pariwisata di wilayahnya sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Penguatan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat, menuju pengelolaan yang profesional dan mandiri, adalah langkah fundamental dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kemandirian pengelolaan, masyarakat lokal akan memiliki peran yang lebih aktif dan signifikan dalam menikmati manfaat dari potensi pariwisata di wilayah mereka.
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal		Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Penurunan signifikan tingkat hunian hotel, yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan restriksi kegiatan *study tour* di sejumlah provinsi, menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan operasional perhotelan, berpotensi mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, serta menggerus secara substansial Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor usaha pariwisata, dan retribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari entitas perhotelan. Dalam konteks kerentanan ini, implementasi standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi imperatif strategis bagi industri pariwisata untuk memperkuat resiliensi, memberikan pelayanan prima yang adaptif terhadap perubahan, dan memitigasi dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian daerah
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal		Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.		Pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya	Yogyakarta sebagai City of Festival telah dihidupi oleh para penggerak dan penggagas festival untuk memfasilitasi dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam Kota penyelenggaraan festival di Yogyakarta. Termasuk dalam membangun ekosistem festival yang meliputi: manajemen dan produksi, mulai dari bagaimana membangun standar kualitas penyelenggaraan festival, hingga strategi pengelolaan program dalam sebuah festival serta *impact* positif di bidang ekonomi, kebudayaan dan lingkungan dalam menjaga keberlanjutannya (*sustainability*). Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Festival adalah upaya bersama untuk mendorong penguatan posisi Yogyakarta sebagai kota kreatif kelas dunia

2.7. Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Yogyakarta melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan.

Berkaitan dengan penyusunan Renstra 2025-2029 ini, Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat digambarkan Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya (Tahun 2023-2026).

Tabel 2. 4 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rupiah	N/A	N/A	N/A	1.100.000	1.523.221	138,47 %	1.600.000	1.970.104	123,13 %	1.700.000	2.226.905	130,33 %	2.000.000	2.259.943	112,33 %
2	Length of Stay (LoS)	Hari	1,00	1,63	163 %	1,5	1,52	101,33 %	1,70-2,1	1,86	109,41 %	1,7	1,87	110 %	1,8	1,88	104,44 %
3	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	A	102,86 %	BB	A	111,85 %

Sasaran OPD Dinas Pariwisata Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), terdapat tiga indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan. Ketiga indikator tersebut meliputi: Rata-rata Belanja Wisatawan, *Length of Stay* (*LoS*), serta Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Berikut uraian capaian masing-masing indikator:

Rata-rata Belanja Wisatawan (dalam Rupiah), Indikator ini tidak memiliki data pada tahun 2020. Mulai tahun 2021, target rata-rata belanja wisatawan ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.523.221 atau sebesar 138,47% dari target. Pada tahun 2022, target meningkat menjadi Rp. 1.600.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.970.104 (123,13%). Tahun 2023 menunjukkan peningkatan capaian yang lebih tinggi dengan target Rp. 1.700.000 dan realisasi Rp. 2.226.905 (130,33%). Sedangkan pada tahun 2024, ditetapkan target sebesar Rp. 2.000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.259.943 atau sebesar 112,33% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam daya beli dan pengeluaran wisatawan selama berada di Kota Yogyakarta.

Length of Stay (*LoS*) atau Lama Tinggal Wisatawan (dalam Hari), Pada tahun 2020, realisasi LoS mencapai 1,63 hari dari target 1 hari, atau 163% capaian.

Tahun 2021, target ditingkatkan menjadi 1,5 hari dan realisasi mencapai 1,52 hari (101,33%). Tahun 2022, target ditetapkan dalam rentang 1,70–2,10 hari, dengan realisasi 1,86 hari (109,41%). Tahun 2023, target ditetapkan kembali pada 1,7 hari dengan realisasi 1,87 hari (110%). Pada tahun 2024, target naik menjadi 1,8 hari dan realisasi tercapai sebesar 1,88 hari atau 104,44% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan minat wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kota Yogyakarta.

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat (dalam Nilai), Indikator ini tidak memiliki data pada tahun 2020 hingga 2022. Penilaian baru tersedia pada tahun 2023, dengan target nilai “BB” dan realisasi mencapai nilai “A” atau 102,86% dari target. Pada tahun 2024, target kembali ditetapkan pada level “BB” dan berhasil direalisasikan dengan nilai “A” yang menunjukkan capaian sebesar 111,85%. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas birokrasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara internal yang dinilai secara mandiri oleh Inspektorat.

Tabel 2. 5 Pencapaian Sasaran Program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Persentase	46,88 %	46,88 %	100 %	50,00 %	50,00 %	100 %	56,25 %	60,98 %	108,41 %	58,80 %	73,17 %	124,44 %	56,89 %	75,86 %	133,35 %
2	Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata	Skala 0-100	85,50	81,60	95,44 %	86,36	103,87	120,28 %	87,95	88,76	100,92 %	92,35	94,16	101,96 %	75,35	75,59	100,32 %
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Wisatawan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000.000	7.279.908	242,66 %	5.000.000	10.583.877	211,68 %
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65.000	309.674	476,42 %	150.000	355.333	236,89 %
5	Persentase SDM	Persentase	N/A	N/A	N/A	66,87 %	91,67 %	137,09 %	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	100 %	50 %	50 %	100,00 %

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pariwisata yang meningkat kompetensinya																
6	Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Persentase	34,69 %	34,93 %	100 %	37,08 %	36,84 %	100 %	39,71 %	39,71 %	100 %	56,83 %	56,83 %	100,00 %	57,11 %	57,11 %	100,00 %
7	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	100 %	A	100 %	100 %

Berdasarkan target dan capaian sasaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Dinas Pariwisata menunjukkan berbagai capaian kinerja yang signifikan berdasarkan tujuh indikator utama. Adapun uraian capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima. Pada tahun 2020, persentase DTW yang memenuhi standar layanan prima mencapai 46,88% dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, capaian tetap konsisten sebesar 50,00% atau 100% dari target. Selanjutnya, pada tahun 2022, target sebesar 56,25% terlampaui dengan capaian sebesar 60,98% (108,41%). Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian 73,17% dari target 58,80% (124,44%). Capaian terbaik terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi 75,86% dari target 56,89%, atau mencapai 133,35%.

Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata (Skala 0–100). Indeks ini menunjukkan tren yang positif sepanjang periode. Tahun 2020 mencatat nilai 81,60 dari target 85,50 (95,44%). Tahun 2021, capaian justru melebihi target dengan skor 103,87 dari target 86,36 (120,28%). Tahun 2022 dan 2023 juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan masing-masing realisasi sebesar 88,76 (100,92%) dan 94,16 (101,96%). Meskipun target tahun 2024 turun menjadi 75,35, realisasi tetap melampaui target sebesar 100,32%.

Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. Data untuk indikator ini mulai tersedia sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut, target sebesar 3.000.000 wisatawan berhasil dilampaui dengan realisasi 7.279.908 wisatawan, atau setara 242,66%. Tahun 2024 mencatat peningkatan lebih lanjut, dengan realisasi

10.583.877 wisatawan dari target 5.000.000 (211,68%).

Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara. Sama halnya dengan wisatawan nusantara, data tersedia sejak 2023. Pada tahun itu, target sebesar 65.000 wisatawan mancanegara terlampaui jauh dengan capaian 309.674 (476,42%). Tahun 2024 juga mencatat pencapaian tinggi sebesar 355.333 dari target 150.000 wisatawan, atau 236,89%.

Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya. Indikator ini mulai dicatat pada tahun 2021 dengan target 66,87% dan capaian 91,67% (137,09%). Tahun 2022 mencapai 100% dari target 100%. Meskipun pada tahun 2023 target diturunkan menjadi 25%, realisasi tetap sesuai target (100%). Tahun 2024 menunjukkan konsistensi dengan target dan realisasi yang sama, yaitu 50% (100%).

Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi. Sejak tahun 2020 hingga 2024, indikator ini menunjukkan pencapaian yang stabil. Tahun 2020 dan 2021 mencatat capaian yang sesuai target (100%). Tahun 2022 hingga 2024, seluruh target juga berhasil dipenuhi dengan tingkat realisasi yang sama, yaitu 100% dari target masing-masing tahun.

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata. Penilaian SAKIP mulai dicatat pada tahun 2023 dengan nilai "A", sesuai target. Tahun 2024 juga menunjukkan hasil yang sama, yakni nilai "A", mempertahankan konsistensi kinerja SAKIP dengan capaian 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan serta menjadi modal penting untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pada tahun 2025-2029.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang berkelanjutan dari sebuah pembuatan keputusan yang memiliki resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian upaya-upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat atau cenderung dinamis. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan pada Visi Misi RPJMD, Visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah: "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**" Visi tersebut akan diwujudkan dengan Misi berikut:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian melalui peningkatan akses Kesehatan dan Pendidikan.
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal.
3. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari.
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

3.1. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

3.2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, spesifik, terstruktur, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2029, yakni dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian		Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Rp. 6.968,81 Miliar	Rp. 7.317,25 Miliar	Rp. 7.683,11 Miliar	Rp. 8.067,27 Miliar	Rp. 8.470,63 Miliar	Rp. 8.894,16 Miliar	
		Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rp. 2.259.943	Rp. 2.309.943	Rp. 2.359.943	Rp. 2.409.943	Rp. 2.459.943	Rp. 2.509.943	
			Length Of Stay (LoS)	1,75-1,88 Hari	1,80 - 1,90 Hari	1,85-1,95 Hari	1,90-2,00 Hari	1,95-2,05 Hari	2,00-2,10 Hari	
		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pariwisata yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	A (86,15-86,65)	A (86,65-87,15)	A (87,15-87,65)	A (87,65-88,15)	A (88,15-88,65)	A	

3.3. Strategi Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029;

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam implementasi Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**" memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Tabel 3. 2 Penyandingan Visi, Misi, Strategi & Arah Kebijakan

VISI Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
MISI	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal.	Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian	• Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata
		• Meningkatkan Kualitas Pemasaran Pariwisata
		• Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi RPJMD dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Pada pelaksanaanya urutan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

No.	**Operasionalisasi NSPK**	**Arah Kebijakan RPJMD**	**Arah Kebijakan Renstra PD**	**Ket.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata	a. Pengembangan Daya tarik Pariwisata; b. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata; c. Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata; d. Pembinaan Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata; e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata; f. Fasilitasi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			g. Pembinaan Industri Pariwisata; h. Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Usaha Jasa Pariwisata; i. Pelayanan Perizinan dan/atau Non Perizinan di Bidang Usaha Jasa Pariwisata; j. Pengawasan Industri Pariwisata; k. Monitoring dan Evaluasi Industri Pariwisata.	
		Meningkatkan Kualitas Pemasaran Pariwisata	a. Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata bagi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Daerah; c. Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Rangka Promosi Pariwisata; d. Misi Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dalam Negeri dan Luar Negeri; e. Pelayanan Informasi Pariwisata; f. Meningkatkan dan Pengembangan Pencitraan (*branding*) Pariwisata;	
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata; c. Fasilitasi dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata; d. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata yang Dikelola oleh Masyarakat; e. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Melalui Jejaring Kemitraan Pariwisata.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terdiri dari empat Program yang direncanakan didanai oleh APBD, dengan deskripsi sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4. 1 Target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	A (86,15)	A (86,15-86,65)	A (86,65-87,15)	A (87,15-87,65)	A (87,65-88,15)	A (88,15-88,65)
	Nilai SPIP Dinas Pariwisata	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,427)	Terkelola dan Terukur (4,427-4,527)	Terkelola dan Terukur (4,527-4,627)	Terkelola dan Terukur (4,627-4,727)	Terkelola dan Terukur (4,727-4,827)	Terkelola dan Terukur (4,827-4,927)
	Nilai IKM Dinas Pariwisata	Nilai	B (85,25)	B (85,25-85,55)	B (85,55-85,85)	B (85,85-86,15)	B (86,15-86,45)	B (86,45-86,75)

B. Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
   a) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   c) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   e) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
   a) Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
   b) Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko

Tabel 4. 2 Target Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima	Persentase	N/A	58.62%	65.52%	72.41%	79.31%	87.93%
	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Persentase	57,11%	33,66%	44,34%	54,37%	63,75%	72,82%

C. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
   a) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
   b) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
   c) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   d) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
   e) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Tabel 4. 3 Target Program Pemasaran Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Wisatawan	10.583.877	10.583.877	10.783.877	10.983.877	11.183.877	11.383.877
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	355.333	355.333	360.333	365.333	370.333	375.333

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   a) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
   b) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
   c) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Tabel 4. 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya	Persentase	50,00%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Tabel 4. 5 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian				Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum		
		Meningkatnya Kualitas Pariwisata			Rata-Rata Belanja Wisatawan		
					Length of Stay (LoS)		
			Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata		Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya Kualitas		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemasaran Pariwisata		Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pariwisata yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Pariwisata	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Pariwisata	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.26.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.26.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.26.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indiaktor Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket,
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota				**Rp. 6.960.278.795**		**Rp. 6.331.733.495**		**Rp. 6.460.516.758**		**Rp. 6.624.496.693**		**Rp. 6.804.587.908**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**		**22 Dokumen**	**Rp. 120.160.000**	**21 Dokumen**	**Rp. 120.160.001**	**21 Dokumen**	**Rp. 120.160.002**	**21 Dokumen**	**Rp. 120.160.003**	**22 Dokumen**	**Rp. 120.160.004**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Rp. 82.420.000	4 Dokumen	Rp. 86.718.000	4 Dokumen	Rp. 86.718.000	4 Dokumen	Rp. 82.420.000	4 Dokumen	Rp. 82.420.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	Rp. 5.640.000	1 dokumen	Rp. 4.500.000	1 dokumen	Rp. 4.500.000	1 dokumen	Rp. 5.640.000	1 dokumen	Rp. 5.640.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	Rp. 5.640.000	1 dokumen	Rp. 4.500.000	1 dokumen	Rp. 4.500.000	1 dokumen	Rp. 5.640.000	1 dokumen	Rp. 5.640.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 dokumen	Rp. 930.000	1 dokumen	Rp. 875.000	1 dokumen	Rp. 875.000	1 dokumen	Rp. 930.000	1 dokumen	Rp. 930.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indiaktor Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket,
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	Rp. 930.000	1 dokumen	Rp. 875.000	1 dokumen	Rp. 875.000	1 dokumen	Rp. 930.000	1 dokumen	Rp. 930.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9 Laporan	Rp. 14.700.000	9 Laporan	Rp. 10.700.000	9 Laporan	Rp. 10.700.000	9 Laporan	Rp. 14.700.000	9 Laporan	Rp. 14.700.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	Rp. 9.900.000	6 Laporan	Rp. 7.925.000	6 Laporan	Rp. 7.925.000	6 Laporan	Rp. 9.900.000	6 Laporan	Rp. 9.900.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**		**28 Laporan**	**Rp.5.398.187.000**	**28 Laporan**	**Rp. 5.030.241.000**	**28 Laporan**	**Rp. 5.051.704.878**	**28 Laporan**	**Rp. 5.079.034.866**	**28 Laporan**	**Rp. 5.109.050.069**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	Rp. 5.385.829.000	30 Orang/bulan	Rp. 5.021.793.000	30 Orang/bulan	Rp. 5.043.256.878	30 Orang/bulan	Rp. 5.070.586.866	30 Orang/bulan	Rp. 5.100.602.069	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	Rp. 1.608.000	1 Dokumen	Rp. 1.608.000	1 Dokumen	Rp. 1.608.000	1 Dokumen	Rp. 1.608.000	1 Dokumen	Rp. 1.608.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	Rp. 2.750.000	12 Dokumen	Rp. 2.750.000	12 Dokumen	Rp. 2.750.000	12 Dokumen	Rp. 2.750.000	12 Dokumen	Rp. 2.750.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp. 1.150.000	1 Laporan	Rp. 1.150.000	1 Laporan	Rp. 1.150.000	1 Laporan	Rp. 1.150.000	1 Laporan	Rp. 1.150.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	Rp. 550.000	1 Dokumen	Rp. 550.000	1 Dokumen	Rp. 550.000	1 Dokumen	Rp. 550.000	1 Dokumen	Rp. 550.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	Rp. 4.600.000	12 Laporan	Rp. 4.600.000	12 Laporan	Rp. 4.600.000	12 Laporan	Rp. 4.600.000	12 Laporan	Rp. 4.600.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	Rp1.700.000	1 Dokumen	Rp1.700.000	1 Dokumen	Rp1.700.000	1 Dokumen	Rp1.700.000	1 Dokumen	Rp1.700.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**		**1 Dokumen**	**Rp. 310.000.000**	**1 Dokumen**	**Rp. 310.000.000**	**1 Dokumen**	**Rp. 331.463.877**	**1 Dokumen**	**Rp. 358.793.866**	**1 Dokumen**	**Rp. 388.809.069**	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Rp. 310.000.000	1 Dokumen	Rp. 310.000.000	1 Dokumen	Rp. 331.463.877	1 Dokumen	Rp. 358.793.866	1 Dokumen	Rp. 388.809.069	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indiaktor Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket,
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**		**6 Laporan**	**Rp. 532.996.745**	**6 Laporan**	**Rp. 334.633.300**	**6 Laporan**	**Rp. 356.097.177**	**6 Laporan**	**Rp. 383.427.166**	**6 Laporan**	**Rp. 413.442.369**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp. 8.287.500	1 Paket	Rp.9.367.500	1 Paket	Rp. 9.367.500	1 Paket	Rp. 9.367.500	1 Paket	Rp. 9.367.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp. 127.906.995	4 Paket	Rp. 68.100.800	4 Paket	Rp. 68.100.800	4 Paket	Rp. 68.100.800	4 Paket	Rp. 68.100.800	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp. 40.835.250	1 Paket	Rp. 19.840.000	1 Paket	Rp. 19.840.000	1 Paket	Rp. 19.840.000	1 Paket	Rp. 19.840.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	Rp. 2.400.000	1 Dokumen	Rp. 2.880.000	1 Dokumen	Rp. 2.880.000	1 Dokumen	Rp. 2.880.000	1 Dokumen	Rp. 2.880.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	Rp. 321.180.000	100 Laporan	Rp. 228.445.000	100 Laporan	Rp. 249.908.877	100 Laporan	Rp. 277.238.866	100 Laporan	Rp. 307.254.069	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	Rp. 32.387.000	1 Dokumen	Rp. 6.000.000	1 Dokumen	Rp. 6.000.000	1 Dokumen	Rp. 6.000.000	1 Dokumen	Rp. 6.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**		**7 Unit**	**Rp. 96.250.000**	**7 Unit**	**Rp. 55.000.000**	**7 Unit**	**Rp. 76.463.877**	**7 Unit**	**Rp. 103.793.866**	**7 Unit**	**Rp. 133.809.069**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	Rp. 96.250.000	10 Unit	Rp. 55.000.000	10 Unit	Rp. 76.463.877	12 Unit	Rp. 103.793.866	13 Unit	Rp. 133.809.069	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**		**12 Laporan**	**Rp. 213.550.000**	**12 Laporan**	**Rp. 209.820.000**	**12 Laporan**	**Rp. 231.283.877**	**12 Laporan**	**Rp. 258.613.866**	**12 Laporan**	**Rp. 288.629.069**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp. 5.000.000	1 Laporan	Rp. 1.900.000	1 Laporan	Rp. 1.900.000	1 Laporan	Rp. 1.900.000	1 Laporan	Rp. 1.900.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp. 208.550.000	12 Laporan	Rp. 207.920.000	12 Laporan	Rp. 229.383.877	12 Laporan	Rp. 256.713.866	12 Laporan	Rp. 286.729.069	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**		**11 Unit**	**Rp. 289.135.050**	**11 Unit**	**Rp. 275.946.195**	**11 Unit**	**Rp. 297.410.072**	**11 Unit**	**Rp. 324.740.063**	**11 Unit**	**Rp. 354.755.263**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	Rp. 27.240.000	1 Unit	Rp. 26.890.000	1 Unit	Rp. 26.890.000	1 Unit	Rp. 26.890.000	1 Unit	Rp. 26.890.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	Rp. 122.765.200	10 Unit	Rp. 115.822.500	10 Unit	Rp. 115.822.500	10 Unit	Rp. 115.822.500	10 Unit	Rp. 115.822.500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	Rp. 20.519.000	40 Unit	Rp. 17.274.500	40 Unit	Rp. 17.274.500	40 Unit	Rp. 17.274.500	40 Unit	Rp. 17.274.500	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indiaktor Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket,
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp. 118.610.850	1 Unit	Rp. 115.959.195	1 Unit	Rp. 137.423.072	1 Unit	Rp. 164.753.063	1 Unit	Rp. 194.768.263	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	**Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima**		**58.62%**	**Rp. 4.857.342.000**	**65.52%**	**Rp. 5.123.537.400**	**72.41%**	**Rp. 5.227.746.755**	**79.31%**	**Rp. 5.360.436.692**	**87.93%**	**Rp. 5.506.163.623**	
	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi		**33,66%**		**44,34%**		**54,37%**		**63,75%**		**72,82%**		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima**		**32 DTW**	**Rp. 3.033.552.500**	**38 DTW**	**Rp. 3.707.322.900**	**42 DTW**	**Rp. 3.781.758.153**	**46 DTW**	**Rp.3.876.536.680**	**51 DTW**	**Rp. 3.980.627.345**	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota		1 Dokumen	Rp. 112.500.000	1 Dokumen	Rp. 103.320.000	1 Dokumen	Rp. 118.207.051	1 Dokumen	Rp. 137.162.756	1 Dokumen	Rp157.980.889	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		58 Lokasi	Rp. 490.352.500	58 Lokasi	Rp. 377.477.500	58 Lokasi	Rp. 392.364.551	58 Lokasi	Rp. 411.320.256	58 Lokasi	Rp432.138.389	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota yang Tersedia dan Terpelihara		7 Unit	Rp. 757.980.000	7 Unit	Rp. 555.580.000	7 Unit	Rp. 570.467.051	7 Unit	Rp. 589.422.756	7 Unit	Rp610.240.889	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota		4 Laporan	Rp. 1.122.465.000	4 Laporan	Rp. 876.880.000	4 Laporan	Rp. 891.767.051	4 Laporan	Rp. 910.722.756	4 Laporan	Rp931.540.889	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota		6 Lokasi	Rp. 550.255.000	6 Lokasi	Rp. 1.794.065.400	6 Lokasi	Rp. 1.808.952.449	6 Lokasi	Rp. 1.827.908.156	6 Lokasi	Rp1.848.726.289	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi**		**104 Usaha Jasa Pariwisata**	**Rp. 1.823.789.500**	**137 Usaha Jasa Pariwisata**	**Rp. 1.416.214.500**	**168 Usaha Jasa Pariwisata**	**Rp. 1.445.988.602**	**197 Usaha Jasa Pariwisata**	**Rp. 1.483.900.012**	**225 Usaha Jasa Pariwisata**	**Rp. 1.525.536.278**	
Terlaksananya Komitmen Melaksanakan Standar Usaha	Jumlah Usaha yang bersedia Memenuhi Standar Usaha		2 Laporan	Rp. 1.626.415.000	2 Laporan	Rp. 1.267.115.000	2 Laporan	Rp. 1.282.002.051	2 Laporan	Rp. 1.300.957.756	2 Laporan	Rp. 1.321.775.889	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Melaksanakan Standar Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah Dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan		30 Pelaku Usaha	Rp. 197.374.500	30 Pelaku Usaha	Rp. 149.099.500	30 Pelaku Usaha	Rp. 163.986.551	30 Pelaku Usaha	Rp. 182.942.256	30 Pelaku Usaha	Rp. 203.760.389	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara**		**10.583.877 Wisatawan**	**Rp. 3.068.068.500**	**10.783.877 Wisatawan**	**Rp. 2.513.525.894**	**10.983.877 Wisatawan**	**Rp. 2.564.649.345**	**11.183.877 Wisatawan**	**Rp. 2.629.744.917**	**11.383.877 Wisatawan**	**Rp. 2.701.236.228**	
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara		**355.333 Wisatawan**		**360.333 Wisatawan**		**365.333 Wisatawan**		**370.333 Wisatawan**		**375.333 Wisatawan**		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	**Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri**		**7 Kegiatan**	**Rp. 3.068.068.500**	**7 Kegiatan**	**Rp. 2.513.525.894**	**8 Kegiatan**	**Rp. 2.564.649.345**	**8 Kegiatan**	**Rp. 2.629.744.917**	**8 Kegiatan**	**Rp. 2.701.236.228**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indiaktor Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket,
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
	Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri		**2 Kegiatan**		**2 Kegiatan**		**3 Kegiatan**		**3 Kegiatan**		**3 Kegiatan**		
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	Rp. 1.076.814.000	4 Dokumen	Rp. 1.168.726.000	4 Dokumen	Rp. 1.178.950.690	4 Dokumen	Rp. 1.191.969.805	4 Dokumen	Rp. 1.206.268.067	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terjalinnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2 Dokumen	Rp. 57.000.000	2 Dokumen	Rp. 99.600.000	2 Dokumen	Rp. 109.824.690	2 Dokumen	Rp. 122.843.805	2 Dokumen	Rp. 137.142.067	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)		-	Rp. 66.625.000	1 Dokumen	Rp. 59.849.394	1 Dokumen	Rp. 70.074.084	1 Dokumen	Rp. 83.093.199	1 Dokumen	Rp. 97.391.461	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terfasilitasnya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		10 Kegiatan	Rp. 1.481.829.500	10 Kegiatan	Rp. 848.050.500	10 Kegiatan	Rp. 858.275.191	10 Kegiatan	Rp. 871.294.303	10 Kegiatan	Rp. 885.592.566	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		5 Promosi	Rp. 385.800.000	5 Promosi	Rp. 337.300.000	5 Promosi	Rp. 347.524.690	5 Promosi	Rp. 360.543.805	5 Promosi	Rp. 374.842.067	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya**		**50,00%**	**Rp. 2.536.187.550**	**62,50%**	**Rp. 2.408.523.550**	**75,00%**	**Rp. 2.457.511.323**	**87,50%**	**Rp. 2.519.887.533**	**100,00%**	**Rp. 2.588.392.299**	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata**		**400 Orang**	**Rp. 2.536.187.550**	**500 Orang**	**Rp. 2.408.523.550**	**600 Orang**	**Rp. 2.457.511.323**	**700 Orang**	**Rp. 2.519.887.533**	**800 Orang**	**Rp. 2.588.392.299**	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		270 Orang	Rp. 978.785.250	270 Orang	Rp. 936.230.583	270 Orang	Rp. 952.559.841	280 Orang	Rp. 973.351.911	280 Orang	Rp. 996.186.833	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		930 Orang	Rp. 1.392.677.300	930 Orang	Rp. 1.350.122.633	930 Orang	Rp. 1.366.451.891	930 Orang	Rp. 1.387.243.961	930 Orang	Rp. 1.410.078.883	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		80 Orang	Rp. 164.725.000	80 Orang	Rp. 122.170.334	80 Orang	Rp. 138.499.591	80 Orang	Rp. 159.291.661	80 Orang	Rp. 182.126.583	

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan ke-3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal, berikut kontribusi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mendukung Program Prioritas tersebut :

Tabel 4. 7 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	Revitalisasi Kampung Wisata	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
		Ekonomi Olahraga	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pemajuan Ekonomi Kreatif	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

1. Revitalisasi Kampung Wisata

   Terbentuknya 45 kampung wisata dengan menampilkan potensi pariwisata kampung wisata melalui penjualan paket wisata yang aktif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di lingkungan kampung wisata.

   - Tahun 2025

     Evaluasi program dan kegiatan pada 25 kampung wisata yang ada saat ini, dan mengidentifikasi potensi destinasi wisata di kelurahan yang belum terbentuk kampung wisata.
   - Tahun 2026

     Mendorong wilayah / kelurahan yang belum memiliki kampung wisata untuk membentuk kampung wisata.
   - Tahun 2027

     Menggali dan mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di kampung wisata.
   - Tahun 2028

     Mengembangkan dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata di kampung wisata.
   - Tahun 2029

     a. Pendampingan dan promosi potensi destinasi wisata yang ada di kampung wisata.
     b. Kampung wisata tida hanya menjadi wisata alternatif, tapi juga wisata unggulan di Kota Yogyakarta.

2. Ekonomi Olahraga

Kegiatan olahraga memiliki nilai Kesehatan, ekonomi dan atraksi yang merupakan kerangka kepariwisataan. Wisata minat khusus olahraga mencapai popularitasnya Ketika masa pandemi dan terus membesar sampai saat ini dan diperkirakan akan semakin menguat di tahun-tahun mendatang. Ceruk wisata minat khusus olahraga sangat potensial dikembangkan di Kota Yogyakarta, olahraga perkotaan dapat digabungkan dengan wisata heritage, sejarah, pendidikan dan kebugaran yang akan menambah pengalaman berwisata. Kegiatan olahraga bernuansa pariwisata akan menggerakkan usaha jasa pariwisata yang menghasilkan dampak ekonomi yang meluas.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sport tourism bulanan berupa kegiatan bersepeda (Yogowes Monalisa) kolaborasi dengan komunitas sepeda se Kota Yogyakarta dan HPI, Fun Run (Tour de Kotabaru) merupakan kegiatan tahunan kolaborasi dengan komunitas pelari dan komunitas usaha jasa pariwisata Kotabaru. Olahraga tradisional masyarakat dikembangkan berupa Festival Layang-Layang kolaborasi dengan KORMI.

- Tahun 2025 (Kondisi Eksisting)

  Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan *sport tourism* berupa kegiatan bersepeda (Yogowes Monalisa) dan kegiatan *fun run* (Tour de Kotabaru). Selain itu, Dinas Pariwisata juga berhasil menjalin kolaborasi dengan KORMI dalam rangka melaksanakan festival layang-layang.
- Tahun 2026 (Memperkuat Pondasi)

  Setelah terlaksananya beberapa event *sport tourism.* Penyelenggaraan kegiatan tersebut akan diperkuat melalui kolaborasi bersama komunitas sepeda wisata (Yogowes) pelari (Tour de Kotabaru) KORMI (festival layang-layang) dan komunitas *downhill* Yogyakarta.
- Tahun 2027 (Kolaborasi Percontohan)

  Terbentuknya kolaborasi dengan berbagai komunitas yang akan menjadi mitra dinas pariwisata dalam mengelola event secara mandiri. Sekaligus menjajaki kolaborasi untuk penyelenggaraan event berskala nasional/internasional.
- Tahun 2028 (Memperbesar Skala)

  Berkurangnya anggaran daerah untuk penyelenggaraan event olahraga, sehingga terdapat sisa anggaran yang bisa dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan event olahraga berlevel nasional/internasional.
- Tahun 2029 (Kegiatan Mandiri dan Berdaya Jual)

  Munculnya beberapa event *sport tourism* yang dikelola secara mandiri dan semakin banyaknya penyelenggara event olahraga tingkat nasional/internasional yang tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan di Kota Yogyakarta.

4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK), Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengacu pada tujuan strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan relevansi terhadap visi-misi kepala daerah, potensi daerah, dan kebutuhan masyarakat, berikut target IKU dan IKK Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rupiah	2.259.943	2.309.943	2.359.943	2.409.943	2.459.943	2.509.943	
2	*Lenght of Stay (LoS)*	Hari	1,75-1,88	1,80 - 1,90	1,85-1,95	1,90-2,00	1,95-2,05	2,00-2,10	
3	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai	A (86,15-86,65)	A (86,65-87,15)	A (87,15-87,65)	A (87,65-88,15)	A (88,15-88,65)	A (88,65-89,15)	

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase	-50,75 %	2.85 %	4.16 %	4.00 %	5.12 %	2.43 %	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persentase	-24,43 %	2,50 %	2,44 %	2,98 %	2,89 %	1,12 %	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persentase	57,33 %	54,23 %	56,73 %	59,23 %	61,73 %	64,23 %	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase	12,75-13,80	12,80-13,84	12,90-13,88	13,00-13,92	13,10-13,96	13,44-14,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor pariwisata selama lima tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dalam implementasi Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan dukungan dan peran serta seluruh *Stakeholders* pemangku kepentingan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta, termasuk masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Pelaksanaan Renstra juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya lokal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta.

Dalam upaya menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Renstra, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode lima tahunan, guna menilai efektivitas pencapaian kinerja, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan sesuai amanat Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menjadi bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah secara keseluruhan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta yang dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Yogyakarta yang unggul, berkarakter, dan berbudaya.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK

Jalan Pabringan No. 1 Ngupasan, Gondomanan - Yogyakarta
Kode Pos 55122; No. Telp. / Faximili: (0274) 515871; Ext.321
Email: perdagangan@jogjakota.go.id; Website: www.perdagangan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 selesai disusun, dokumen Renstra Dinas Perdagangan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada pedoman penyusunan renstra berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disususn dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang secara teknis di jabarkan dalam Renstra Dinas Perdagangan sebagai perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang dirancang lebih terstruktur, terukur, sistematis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kami berharap Renstra Dinas Perdagangan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan program-program yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah perangkat daerah terutama pada Sektor Perdagangan Kota Yogyakarta yang berdaya guna dan berdaya saing.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

Veronica Ambar Ismuwardani, SIP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196912031989032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Gambaran Umum Renstra Perangkat Daerah 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **6**
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 7
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia 7
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana 8
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9
2.1.3.2. Indikator Kinerja Program 11
2.1.4. Gambaran Umum Keuangan Perangkat Daerah 16
2.1.4.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Perangkat Daerah Lima Tahun Terakhir 16
2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 19
2.2.1. Permasalahan 19
2.2.1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.2.1.2. Kondisi Lingkungan Hidup Berdasarkan laporan Kajian Lingkung Hidup Strategis (KLHS) 21
2.2.2. Isu Strategis 23
2.2.2.1. Isu Global 23
2.2.2.2. Isu Nasional 25
2.2.2.3. Isu Regional 26
2.2.2.4. Isu Strategis Daerah 26
2.2.2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **31**
3.1. Tujuan dan Sasaran 31
3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 32
3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 32
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 33
3.2.1. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 34
3.2.1.1. Lokus Pembangunan Renstra PD Tahun 2025-2029 35
3.2.1.2. Orientasi Pembangunan Kewilayah Berdasarkan Ruang Lingkup Sektor Ekonomi 35
3.2.1.3. Lokus Pembangunan Prioritas 36
3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 37
3.2.3. Program Prioritas 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah 40
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 67

BAB V PENUTUP 69
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Teknis Meyimpulkan Isu Strategis PD 30
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 33
Tabel 3.4. Pentahapan Renstra PD 35
Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 37
Tabel 4.2. Teknik Merumusakan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 41
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 49
Tabel 4.4. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 66
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD 68
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 7
Gambar 2.2. SDM Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 8
Gambar 2.3. Bangunan/Gedung Pasar Rakyat berdasarkan Kelas Pasar 9
Gambar 2.4. Indeks Kinerja Perdagangan Tahun 2020-2024 10
Gambar 2.5. hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh inspektorat Tahun 2020-2024 11
Gambar 2.6 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Tahun 2020-2024 12
Gambar 2.7. Pendapatan pusat Bisnis tahun 2020 – 2024 12
Gambar 2.8. persentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya tahun 2020-2024 13
Gambar 2.9. Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat tahun 2020-2024 14
Gambar 2.10 Pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2024 14
Gambar 2.11 Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok tahun 2020-2024 15
Gambar 2.12 Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah tahun 2020-2024 15
Gambar 2.13 Persentase peningkatan Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina tahun 2020-2024 16
Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 32
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra 33
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya inilah yang harus diatasi dengan membuat perencanaan pembangunan agar pilihan tindakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen strategis, Rencaana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Proses penyusunan Renstra PD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam proses penyusunannya, renstra PD Tahun 2025 telah mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029 dan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, Renstra PD Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta, Prinsip-prinsip SDGs berdasarkan hasil KLHS.

Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra PD 2025-2029 disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan

demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.1.1. Gambaran Umum Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dimana Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 2025-2029, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakata sampai dengan tahun 2025-2029, RPJMD DIY 2022 – 2027, dan RPJMN 2025 – 2029.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan program strategis penjabaran visi, misi, dan program RPJMD Kota Yogyakarta yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode tahun 2025-2029 yang disahkan oleh Kepala Daerah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari keterpaduan pada kementrian/lembaga, provinsi yang berkaitan dengan urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan pada keselarasan dan keterkaitan dengan Rencana Pembanguan Daerah Kota Yogyakarta, Renstra K/L, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek perdagangan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Perangkat Daerah ini yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029

2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan untuk periode tahun 2025-2029
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang perumusan Renstra, dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai Gambaran Pelayanan Perangkat daerah, meliputi tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok sasaran layanan. Uraian ini juga mencakup Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah. Di dalamnya turut dijelaskan identifikasi permasalahan dan penentuan isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan di tingkat global, nasional, dan regional.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat arah pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program prioritas pembangunan. Subbab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sekurang-kurangnya memuat rumusan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Sementara itu, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja perangkat daerah. Subbab Program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah mencantumkan daftar program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk mencapai kinerja perangkat daerah, serta indikator program, kegiatan, sub kegiatan, target, dan pagu indikatif masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan pada periode tersebut. Selanjutnya, Subbab Kinerja Penyelenggaraan bidang ururusan memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target penyelenggaraan perangkat daerah selama periode Renstra yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU).

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra setelah periode berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Kota Yogayakarta memupnyai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan bidang perdagangan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari:

1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub bagian Keuangan.
   c. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
   d. Bidang Pasar Rakyat;
   e. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
   f. Unit Pelaksana Teknis.
2) Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan ungsional.
3) Kedudukan Tugas dan Fungsi:
   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 menetapkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan bidang perdagangan.
   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
   d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4) Struktur Organisasi
   Secara garis besar susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada struktur organiasi perangkat daerah sebagaimana Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023. Struktur organisasi Dinas Perdagangan kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peranan penting penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari unsur Sumber Daya yang dimiliki oleh perangkat Daerah dalam menunjang operasional dan pelayanan yang maksimal. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas perdagangan berdasarkan cut off penilaian asset dan keadaan kondisi SDM semester I Tahun 2025 dengan sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manuisa menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan, disamping itu SDM yang dapat menjalankan fungsi organisasi perangkat daerah secara optimal dan professional. Pada tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Pegawai ASN Dinas Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan kebutuhan pegawai sebanyak 208 formasi sesuai bezzeting 69 formasi, yang belum terisi 139 formasi, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

1. PNS Golongan IV sejumlah 6
2. PNS Golongan III sejumlah 43
3. PNS Golongan II sejumlah 18
4. PNS Golongan I sejumlah 0
5. PPPK sejumlah 2

Untuk memenuhi kebutuhan formasi ideal Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan belum mencukupi. Pada tahun 2025 telah diperbantukan jasa tenaga katagori perjanjian kontrak perseorangan maupun perusahaan dengan jumlah 485 personil terdiri dari 92 Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP), 9 Jasa Tenaga Profesional dan 384 Tenaga Alih Daya (Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Sopir dan Pembantu Sopir) untuk membantu tugas dan fungsi Dinas baik berkaitan dengan Administrasi, Sarpras, Teknologi Informasi, Teknik Bangunan, Tenaga Operasional Lapangan yang berada di unit kerja maupun di 29 (dua puluh sembilan) Pasar Rakyat Kota Yogyakarta, sehingga keseluruhan

personil Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berjumlah 554, kondisi SDM Dinas perdagangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 SDM Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perangkat daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi penting dalam menunjang kegiatan dan operasional bagi SDM Dinas perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perdagangan dengan sarana dan prasarana yang memadai, berikut sarana dan prasaran yang dimiliki Dinas perdagangan Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2025, ditampilkan gambar berikut.

Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Semester I Tahun 2025

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan Dan Mesin	4604 unit	-
2	Gedung Dan Bangunan	74 unit	-
3	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	15 unit	-
4	Aset Tetap Lainnya	305 unit	-
5	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0 unit	-
6	Aset Tidak Berwujud	7 unit	-
7	Aset Lain-Lain	0 unit	-

Suberdata: data diolah Dinas Perdagangan berdasarkan Sim Aset Pemerintah Kota Yogyakarta Semestr I tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta difasilitasi sarana dan prasaran yang mendukung operasional ketugasan personil dalam menunjang pelayanan secara optimal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain yaitu kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, komputer, laptop, printer, TV, LCD proyektor, telepon/smartphone, HT, kursi, meja, UPS, dan peralatan jaringan.

Selain sarana dan prasaran tersebut, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mempunyai bangunan/gedung yang digunakan untuk fungsi pelayanan terdiri dari bangunan/gedung utama Dinas Perdaganagan dan bangunan/gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebar di berbagai lokasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan dan operasional kedinasan. disamping itu bangunan/gedung yang di kelola Dinas

Perdagangan juga mengelola 29 Pasar Rakyat dengan kelasifikasi yang berbeda, Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta terdiri dari berbagai kelas pasar yang tersebar di beberapa wilayah dengan daftar bangunan/gedung pasar rakyat dapat dilihat pada gambar berikut.

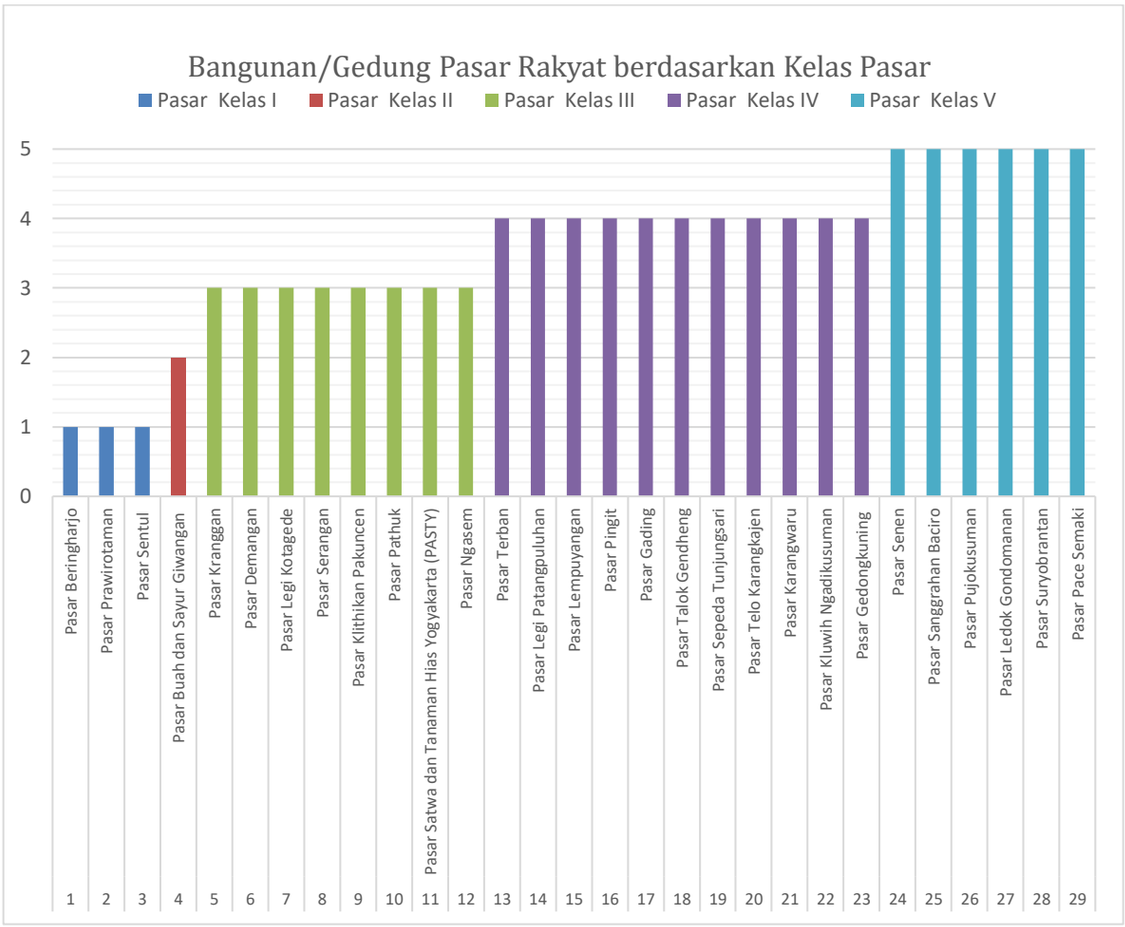

Gambar 2.3 Bangunan/Gedung Pasar Rakyat berdasarkan Kelas Pasar

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029 mendasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam menerjemahkan dan menyelaraskan penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Yogayakarta yang konsisten dan berkesinambungan dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2025-2029 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan kinerja penyelengaraan pelayanan perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2020 – 2024 untuk menajamkan rumusan dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah secara Komprehensif dan aktual terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.1.3.1.1. Indeks Kinerja Perdagangan

Indeks Kinerja Perdagangan merupakan bagian dari penentuan nilai indeks dari pencapaian kinerja pasar rakyat, kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya, kinerja pengendalian harga bahan pokok, kinerja pembinaan UKM dan kinerja tera alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Selama tahun 2020-2024 nilai indeks perdagangan kota Yogyakarta menunjukan tren yang pluktuatif. Penurunan nilai indeks perdagangan pada dua tahun terakhir disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kinerja pengendalian harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil pada tahun 2024 ditemukan 1 satu komoditas barang kebutuhan pokok berupa cabe rawit merah mengalami kenaikan

harga berturut-turut hal ini terjadi karena kondisi perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan panen sangat berpengaruh, komoditas tersebut didistribusikan langsung dari daerah lain ke Kota Yogyakarta yang berdampak pada kelangkaan ketersedian komoditas menyebabkan adanya gejolak harga, selanjutnya pada kinerja metrologi legal untuk pelayanan tera/tera ulang masih ada peralatan UTTP yang dimiliki oleh pelaku usaha belum memiliki ijin ruang lingkup yang dipersyaratkan Direktorat Metrologi Legal sebagai syarat melaksanakan pelayanan Metrologi Legal berupa tera ulang. Indeks kinerja perdagangan pada tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan periode tahun 2021 - 2024 karena ada perubahan nomenklatur permendagri nomor 90 tahun 2020 dan pembentukan perangkat daerah di tahun 2021 sehingga adanya perubahan kinerja yang signifikan.
Fluktuasi ini mengindikasikan pentingnya penguatan Kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan barang pokok di pasar rakyat dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting yaitu sebagai langkah strategis perdagangan yang berkelanjutan, selanjutnya penguatan edukasi terhadap pelaku usaha agar memahami standar baku tentang peralatan standar UTTP yang digunakan untuk memberikan manfaat bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen.

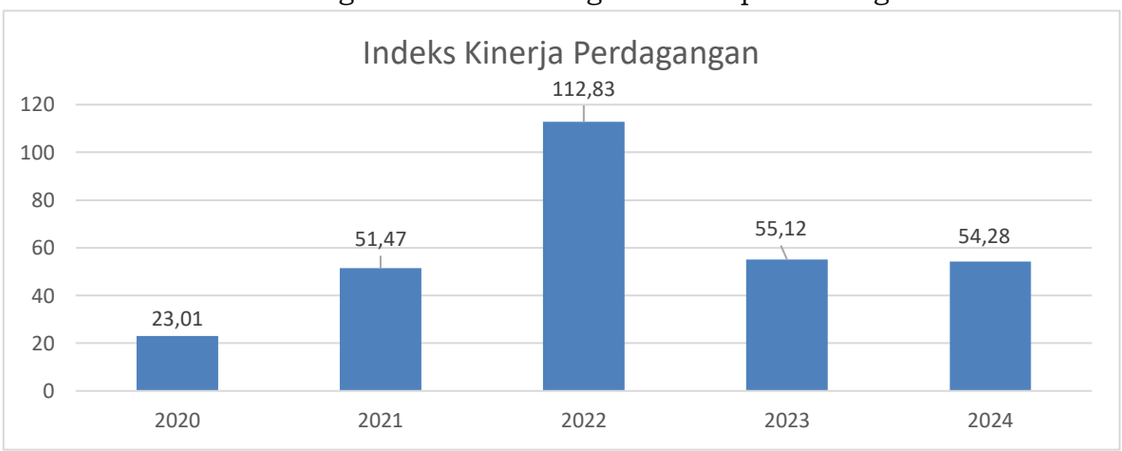

Gambar 2.4 Indeks Kinerja Perdagangan Tahun 2020-2024

2.1.3.1.2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat

Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui penilaian reformasi birokrasi (RB). Nilai reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90–100), Memuaskan (80–90), Sangat Baik (70–80), Baik (60–70), Cukup (50–60), Kurang (30–50), dan sangat kurang (0-30). Aspek penilaian RB ditentukan berdasarkan pada 8 instrumen yang dinilai yaitu, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP, Indeks Profesionalitas ASN, Penilaian Pengawasan Arsip Internal, dan Penilaian Indeks Pembangunan Statistik.
Secara umum, nilai reformasi birokrasi di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai reformasi birokrasi terendah yang dicapai Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2020 sebesar 67,60 dengan predikat BB. Sementara itu, nilai reformasi birokrasi tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 95,74 dengan predikat AA. nilai Reformasi Birokrasi di tahun 2024 sebesar 89,839 mengalami penurunan, Namun pada tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya

karena mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Pada tahun 2024, beberapa komponen yang masih perlu ditingkatkan antara lain Indeks pembangunan statistik dan indeks kepuasan masyarakat yang didominasi oleh data statistik secara umum masih terbatas pada pemanfaatan data yang bersifat umum, yang secara khusus belum menyajikan informasi data yang langsung berkaitan dengan urusan perdagangan, sedangkan indeks kepuasan masyarakat yang menggambarkan tingkat kepuasan maksimal belum sepenuhnya terpenuhi hal ini karena bebrapa sub indikator yang perlu penanganan optimal terutama pada keberadaan inprastruktur pasar rakyat yang belum merata dan terjangkau di 29 pasar rakyat.

Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peningkatan data statistik yang relevan dan pemerataan kondisi sarana dan prasarana di pasar rakyat yang lebih baik sebagai langkah stategis yang berkelanjutan.

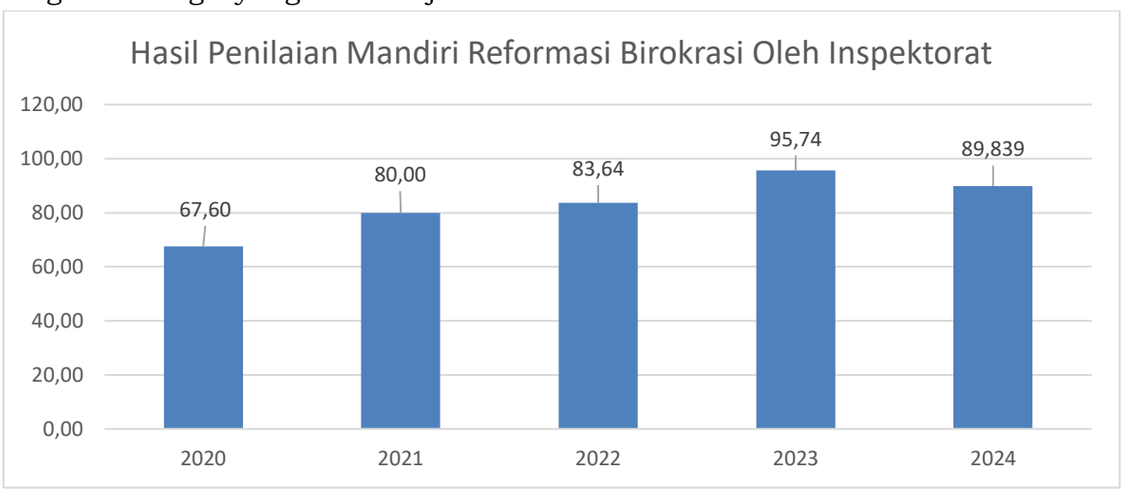

Gambar 2.5 hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh inspektorat Tahun 2020 – 2024

2.1.3.2. Indikator Kinerja Program

2.1.3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan

Penilaian SAKIP Dinas Perdagangan dapat diukur dengan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel dan bobot penilaian tertuang dalam lembar kerja evaluasi yang menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot pada 4 kriteria yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indikator ini menunjukan capaian AKIP Dinas Perdagangan pada tahun 2024 dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 88,90, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 79,26, berdasarkan penilaian Inspektorat ditahun 2022 adanya kinerja PD yang belum sesuai dengan kaidah dan tatacara penilaian AKIP pada sub indikator dan kriteria penilaiannya terutama pada penguatan bukti dukung dan metode analisa laporan yang disajikan dan bukti dukung yang relevan dan memadai, namun jika dilihat perkembangannya SAKIP Dinas Perdagangan menunjukan adanya peningkatan sejak dua tahun terakhir.

Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas dan bukti dukung yang memadai pada masing-masing kriteria melalui elaborasi lintas sektor dengan metode efektif dan inovatif

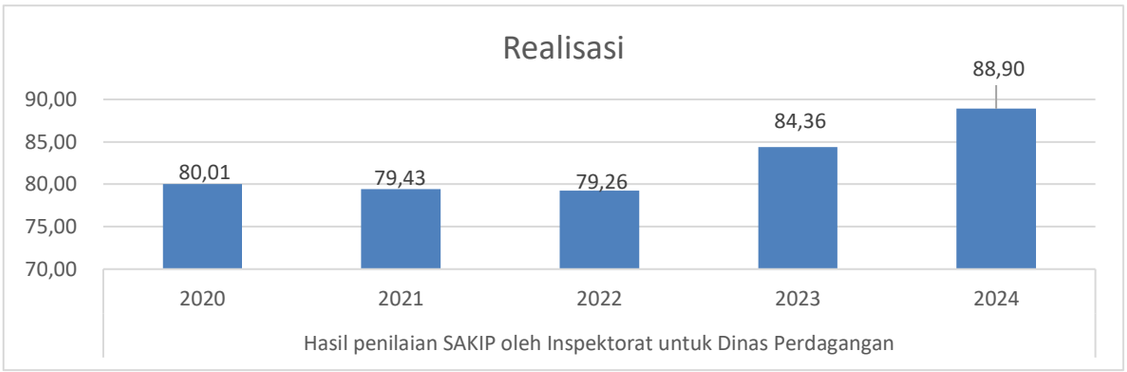

Gambar 2.6 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Tahun 2020 – 2024

2.1.3.2.2. Pendapatan UPT Pusat Bisnis

Indikator Pendapatan UPT Pusat Bisnis digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bawah tugas dan fungsi UPT Pusat Bisnis dengan tujuan meningkatkan pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis sebagai fungsi pelayanan pada area premium pusat perbelanjaan beringharjo dan Studio 103 rooftop pasar parwirotaman

Indikator ini menunjukan adanya peningkatan pada kurun wakut tiga tahun terakhir, pada tahun 2021 pendapatan pusat bisnis menempati posisi terendah sebesar Rp. 2.404.929.465,22, sedangkan pendapatan tertinggi diraih pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.933.182.475,00. Realisasi pendapatan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini didorong adanya arah kebijakan tentang perubahan tarif dan penguatan promosi dan kerjasama pemanfaat lahan diarea premium pusat perbelanjaan dan ruang ekonomi kreatif studio 103 pasar prawirotaman, namun demikian pendapatan di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun berikutnya karena pada saat itu sedang berlangsung penanganan pandemi global covid 19 secara masiv di tingkat nasional melalui berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi.

Gambar 2.7 Pendapatan pusat Bisnis tahun 2020 - 2024

2.1.3.2.3. Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya

Indikator Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dibawah tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan pengendalian perdagangan, bertujuan untuk pengendalian laju peredaran penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pangan yang beredar ditingkat pasar rakyat maupun toko modern melalui pengawasan distribusi dari hulu ke hilir untuk memastikan Tingkat keamanan pangan di Kota Yogyakarta dapat dikendalikan dengan harapan Kota Yogyakarta menjadi Kota Aman Pangan.

Berdasarkan pengawasan peredaran bahan berbahaya data menunjukan adanya tren persentase penurunan kasus yang pluktuatif pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 37,5% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 25% hal ini dipicu adanya cakupan wilayah pengawsan yang diperluas sehingga potensi adanya penemuan kasus yang semakin berkembang seiring dengan banyaknya pasokan distribusi makanan dan pangan yang masuk kewilayah Kota Yogyakarta.

Kondisi ini menunjukan pentingnya kolaborasi dan pengembangan inovasi terhadap pengawasan bahan berbahaya dengan berbagai lintas sektor serta penanganan dini sebelum diperoses lebih lanjut ketahap berikutnya untuk memastikan keakurasian hasil pengujian sampel yang ditangani.

	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	20,00	20,00	20,00	37,50	25,00
Target	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00

Gambar 2.8 persentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya tahun 2020-2024

2.1.3.2.4. Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat

Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat, Indikator ini digunakan untuk menentukan pasar rakyat yang masuk dalam katagori pasar yang berstandar.

Penilaian indikator pasar rakyat berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang pasar tentang pasar rakyat, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah pasar rakyat yang berstandar yaitu 1 (satu) pasar setiap tahun dengan mempertimbangkan aspek fisik, manajemen, ekonomi dan sosial dengan persyaratan memenuhi syarat standar pasar rakyat, aspek penilaian dihitung berdasarkan kriteria dan sub indikator penilaian yang dinilai baik dengan persentase ≥70% telah memenuhi standar pasar rakyat.

Indikator ini menunjukan tren meningkat setiap tahunnya, dari 29 pasar rakyat tersebar di Kota Yogyakarta setiap tahunnya menargetkan satu pasar rakyat yang akan dinilai dengan kriteria standar, hampir keseluruhan selama periode 2020-2024 pasar rakyat telah memenuhi standar dan memadai walaupun masih terdapat beberapa kriteria yang menunjukan katagori baik belum terpenuhi, seperti penyediaan sarpras metrology legal, pemberdayaan bertkelanjutan, kondisi fisik dan cakupan pengawasan perdagangan, namun demikian pada tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023-2024 karena adanya perubahan kinerja yang sebelumnya pokus pada penilaian standar pasar sehat, hal ini menyelaraskan fungsi (Top-down) Kementrian/Lembaga/daerah yang membidangi pasar rakyat. Kondisi diatas mengindikasikan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang responsif dan berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam pencapaian mutu dan kualitas pasar rakyat yang memadai.

Gambar 2.9 Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat tahun 2020-2024

2.1.3.2.5. Pendapatan retribusi pasar

Indikator Pendapatan retribusi pasar adalah indikator ke 2 (dua) yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi di Bidang Pasar Rakyat, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II dan UPT PASTY, perda pasar rakyat meliputi klasifikasi pasar rakyat type A, B, C dan D dengan fasilitas pasar rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi kios, los dan pelataran, sedangkan fasilitas penunjang meliputi tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan radio Pasar Rakyat.

Indikator ini menunjukan adanya peningkatan pada kurun wakut tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 pendapatan retribusi pasar menempati posisi terendah sebesar Rp. 9.934.895.700,00 sedangkan pendapatan tertinggi diraih pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.946.182.379,00 Realisasi pendapatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini didorong adanya arah kebijakan tentang perubahan tarif dan penguatan promosi dan kerjasama pemanfaat lahan, namun demikian pendapatan di tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun berikutnya karena pada saat itu sedang berlangsung penanganan pandemi global covid 19 secara masiv ditingkat nasional dimana pemerintah memberlakukan penerapan kebijakan yang pokus terhadap penanganan konsisi sosial dan ekonomi.

Gambar 2.10 Pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2024

2.1.3.2.6. Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

Indikator Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok digunakan untuk menentukan tingkat capaian Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan tujuan untuk pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatkan daya beli

konsumen dan pelaku usaha mikro dan kecil Kota Yogyakarta dengan harga yang terjangkau.

Indikator ini menunjukan stabiliasi harga kebutuhan pokok selama kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2023 sebesar 96,00 dan tahun 2024 sebesar 98,04. Adanya penurunan capaian di tahun 2023 karena dari 51 (lima satu) komoditas terdapat 1 (satu) komoditas pada cabai rawit mengalami perubahan harga berturut turut. namun demikian pada tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan sebagai ukuran capaian karena adanya perubahan nomenkelatur kinerja yang signifikan yang difokuskan pada informasi pemantauan harga melalui sistem terintegrasi.

Gambar 2.11 Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok tahun 2020-2024

2.1.3.2.7. Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah

Indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha di bidang barang dan jasa pada lingkup terib ukur yang dapat memberikan manfaat luas sebagai bentuk perlindungan konsumen di Kota Yogyakarta disamping itu keberadaan UPT metrologi legal untuk menyediakan sarana dan prasarana dan peningkatan pelayanan agar mendapatkan kepastian dan keakurasian alat yang di tera/tera ulang sehingga dapat meminimalisir dari tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Gambar 2.12 Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah tahun 2020-2024

2.1.3.2.8. Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina

Indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan omzet pelaku UMKM

binaan melalui fasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Indikator ini menunjukan capaian yang fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan omzet pelaku usaha binaan sebesar -17% berada posisi terendah, sedangkan pada tahun 2022 terdapat lonjakan yang cukup tinggi sebesar 340,71%. fakta menunjukan bahwa pada tahun 2020 dunia sedang dilanda pandemi global covid 19 dimana terjadinya kelesuan dunia usaha dan berbagai kebijakan pemerintah untuk beradaptasi mengurangi aktivitas pembatasan sosial secara masiv dalam waktu yang cukup Panjang, sehingga kondisi ini yang realistis berdampak pada kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan capaian pada tahun 2022 kenaikan ini dipicu oleh kondisi pandemi yang semaikan berangsur membaik serta peran pemerintah dalam membuka akses seluas luasnya untuk pemulihan ekonomi secara nasional, namun demikian padatahun berikutnya tidak dapat dibandingkan dengan karena adanya perbaikan data kinerja dan penetapan target awal dari dan memasuki renstra periode 2023-2026 dimana ada masa transisi kekosongan kepala daerah karena adanya pemilu serentak di tahun 2025.

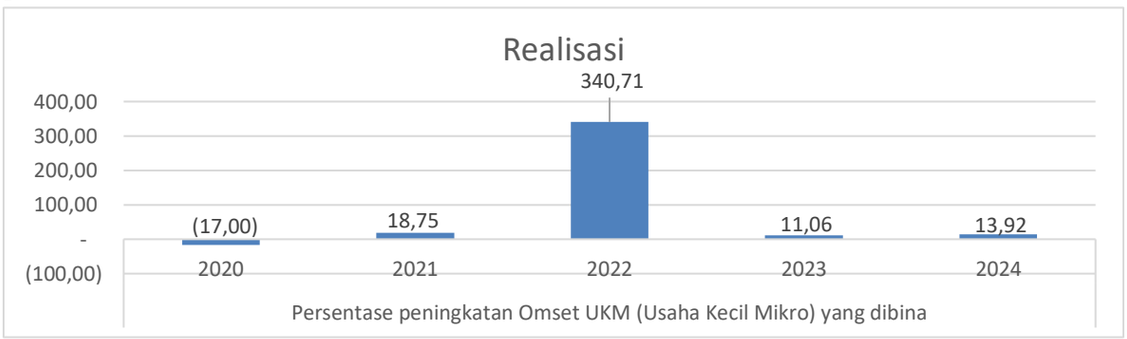

Gambar 2.13 Persentase peningkatan Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina tahun 2020-2024

2.1.4. Gambaran Umum Keuangan Perangkat Daerah

2.1.4.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Perangkat Daerah Lima Tahun Terakhir

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta semua kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui entitas lain, serta hak daerah dalam memungut pajak dan retribusi.

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), kondisi keuangan Dinas perdagangan Kota Yogyakarta menunjukkan stabilitas dan tren yang relatif positif, baik dari sisi pendapatan dan belanja. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp14,6 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp20,6 miliar pada tahun 2024, dengan kontribusi utama dari retribusi daerah. Di sisi belanja, realisasi anggaran semakin optimal, tercermin dari peningkatan persentase capaian belanja dari 90,45% pada tahun 2020 menjadi hanya 93,76% atau ada efisiensi 6,24% pada 2024. Alokasi belanja juga menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap berbagai program, seperti pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pengawasan perdagangan, pelayanan metrologi legal dan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja sesuai amanat nasional.

2.1.4.1.1. Pendapatan Perangkat Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Capaian realisasi pendapatan daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada periode tahun anggaran 2020–2024 secara konsisten selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi sebesar 115,84% pada tahun 2024. Capaian lebih dari 100% menunjukkan bahwa pendapatan riil melebihi pendapatan yang ditargetkan. Secara umum, baik target maupun realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 1,26% per tahun. Rincian target, realisasi, serta capaian pendapatan perangkat daerah pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Pendapatan Dinas perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Bertambah/Berkurang
2020	14.603.044.455,13	16.146.543.634,10	110,57	1.543.499.178,97
2021	12.348.626.249,00	13.852.126.740,22	112,18	1.503.500.491,22
2022	16.379.032.680,00	18.927.076.194,97	115,56	2.548.043.514,97
2023	18.370.768.336,00	20.043.537.282,00	109,11	1.672.768.946,00
2024	20.614.456.000,00	23.879.364.854,00	115,84	3.264.908.854,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.1.2. Belanja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diartikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran atas realisasi kebijakan belanja pada periode sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembelanjaan di masa mendatang.

Selama periode 2020–2024, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menerapkan strategi penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran. Hal ini tercermin dalam RPJMD 2020–2024, yang memuat arah kebijakan berupa peningkatan kualitas dokumen penganggaran dan optimalisasi pengendalian pelaksanaan anggaran. Strategi ini dilanjutkan dalam RPD 2023–2026, yang menargetkan tingkat pelaksanaan anggaran hingga 100% sebagai bentuk akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.

Namun demikian, realisasi belanja daerah selama periode 2020–2024 masih menunjukkan adanya deviasi dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian realisasi belanja selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 92,65%, menandakan bahwa belum seluruh alokasi anggaran dapat terserap secara optimal. Penyebabnya dapat berasal dari ketidaktepatan penentuan target, perencanaan kegiatan yang kurang realistis, maupun kendala dalam pelaksanaan program.

Capaian tertinggi selama periode Renstra dan awal RPD tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar 94,56%, dengan realisasi anggaran belanja mencapai Rp43,35 miliar dari target Rp45,84 miliar. Meskipun masih di bawah target, angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Selisih antara target dan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp3,00 miliar juga relatif lebih kecil dibandingkan deviasi tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja ini memberikan sinyal positif atas penerapan kebijakan penganggaran yang semakin baik. Ke depan, konsistensi dalam menetapkan target yang realistis, serta penguatan pelaksanaan dan monitoring kegiatan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa belanja daerah dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata

bagi pembangunan Kota Yogyakarta. Rincian target, realisasi, serta capaian belanja perangkat daerah pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Capaian Target Belanja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Bertambah/Berkurang
2020	34.881.789.840,00	31.551.137.287,28	90,45	-3.330.652.552,72
2021	35.852.437.296,00	32.784.768.435,16	91,44	-3.067.668.860,84
2022	44.670.125.471,00	41.562.279.232,00	93,04	-3.107.846.239,00
2023	45.845.461.284,00	43.351.662.388,00	94,56	-2.493.798.896,00
2024	48.357.859.781,00	45.356.934.998,00	93,79	-3.000.924.783,00

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas perdagangan tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2023 tentang tugas dan fungsi perangkat daerah mempunyai ketugasan dan fungsi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan pada perangkat daerah, pelayanan penyelenggaraan perangkat daerah yang dijalankan Perangkat daerah mempunyai karakteristik dan dukungan yang saling terakit baik berkaitan dengan sasaran internal dan eksternal Perangkat Daerah, keterkaitan dukungan pihak lain yang yang terlibat memberikan pedback terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah. Penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perdagngan terdiri dari kinerja utama dinas perdagangan untuk mewujudkan Sektor Perdaganagan dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan penyelenggaraan reformasi biokrasi dinas perdagangan. Penyelenggaraan kinerja Dinas perdagangan yang terlibat didalamnya meliputi kelompok sasaran internal dan kelompok sasaran eksternal, berikut adalah gambaran umum kelompok sasaran layanan pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

a. Kelompok Sasaran Internal :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
   - Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
   - Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
   - Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
   - Pengawasan dan Consulting
   - Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
   - Pengelolaan kearsipan
b. Kelompok Sasaran Eksternal:
   - Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan kriteria standar Pasar Rakyat
   - Penguatan pengawasan perizinan lingkup perdagangan terhadap pemenuhan komitmen berusaha toko swalayan, pengawasan gudang, pengawasan minuman beralkohol, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya pada Bahan Tambahan Makanan/Pangan (BTM/P) yang beredar di toko modern dan pasar rakyat
   - Menjamin kesetabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kota Yogyakarta

- Penyelenggaraan metrologi legal melalui tera/tera ulang berupa alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sebagai bentuk perlindungan konsumen
- Fasilitasi promosi dan penggunaan produk dalam negeri yang berorientasi ekspor

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

2.2.1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1.1. Minimnya pengawasan tertib niaga sektor perdagangan

Luasnya cakupan dunia usaha sektor perdagangan terutama pada pengawasan perizinan sebagai hal penting untuk melihat kondisi perdagangan yang kompetitif dan sehat sebagai indikator kemajuan ekonomi wilayah, bagian terpenting adalah bagaimana kalangan dunia usaha dapat memberikan konstirbusi terhadap perkembangan ekonomi diwilayah kota yogyakarta pada khususnya dengan kata lain pentingnya pengawasan dan penerapan regulasi perizinan sebagai awal mula terciptanya kondisi lingkungan dunia usaha yang sehat dan berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi namun juga aspek sosial. Fungsi pengawasan menjadi hal penting terutama di sektor perdagangan melalui pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kalangan dunia usaha yang dipokuskan pada pengawasan tertib niaga pada Toko swalayan, Gudang Minuman Beralkohol dan peredaran penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pangan yang intensif. Perizinan usaha toko swalayan yang terus berkembang di Kota Yogyakarta di tahun terakhir 2024 bekisar 177 toko swalayan yang sudah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan terutama pada kebijakan lokal tentunya untuk menjaga stabilitas tanpa mengurangi persaingan usaha lainnya yang dikembangan oleh kalangan wirausaha lokal atau UMKM, keberadaan gudang sebagai alat untuk mengukur tingkat distribusi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen di tahun 2024 terdapat 30 gudang yang diawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Perkembangan usaha minuman beralkohol untu type golongan C menjadi pokus pengawsan terutama pada pelaku usaha di cafe, hotel atau lainnya pada tahun 2024 terdapat 33 pelaku usaha yang terdaftar untuk memastikan adanya pelanggaran maka terus diupayakan pengawasan yang intensif. Penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pangan menjadi pokus pengawasan terutama pada pelaku usaha di tokos walayan, pasar rakyat, pasar musiman maupun pedagang kaki lima yang berada di Kota yogyakarta memastikan peredarannya dapat ditekan dan di awasi untuk mengurangi laju peredaran sebagai bentuk perlindungan konsumen.

2.2.1.1.2. Belum terpenuhinya Standar Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta sesuai kriteria standar regulasi

Pasar rakyat atau dikenal dengan pasar tradisional mempunyai image yang negatif dikalangan masyarakat dengan minimnya fasilitas, bangunan yang kurang memadai serta kondisi lingkungan yang kumuh, akan tetapi pasar rakyat menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat dan sebagai pemenuhun kebutuhan primer dan skunder tidak terelakkan. Keberadaan pasar rakyat di Kota Yogyakarta sebagian belum memenuhi standar yang layak, penentuan standar Pasar Rakyat diukur pada 4 (empat) kriteria yaitu fisik, manajemen, ekonomi dan sosial. Pasar rakyat di Kota Yogyakarta terdapat 29 pasar rakyat dibawah pengelolaan Dinas Perdagangan yang tersebar di berbagai wilayah kemantren atau kalurahan dengan kelas pasar yang bervariatif yaitu pasar kelas I, II, III, IV dan V. Kondisi pasar rakyat saat ini masih ada yang belum memenuhi standar regulasi karena berbgai hal antara lain kondisi sejarah, banguanan dan lainnya bukan berarti belum memenuhi standar pasar dianggap tidak layak, sebagai contoh sebagian standar pasar rakyat pada kondisi fisik

dengan kondisi lahan yang seaadanya, keluasan bangunan belum sesuai, prasarana belum memadai hal ini tentu membutuhkan efort yang kuat untuk mendorong pengembangan pasar rakyat yang dapat memenuhi standar regulasi.

2.2.1.1.3. Minimnya Intervensi pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Kota yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa, kota pendidikan, kota wisata dan budaya didominasi oleh keanekaragaman kalangan dunia usaha yang majemuk, kondisi perkotaan dan penduduk yang padat dengan keluasan wilayah yang terbatas dan cakupan lahan pertanian yang minimalis tentu saja menjadi faktor penting untuk menghadapi kondisi utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer dipokuskan pada ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting yang ditopang oleh daerah lain yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan barang kebutuhan pokok terkendala minimnya lahan pertanian dan belum meratanya pemanfaatan sumberdaya alam di tengah tengah kota dan sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemenuhan kebutuhan barang pokok terdapat 51 (lima puluh satu) komoditas yang didatangkan langsung dari kabupaten/kota lainnya terutama di wilayah DIY seperti kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan BAPOKTING di kota Yogyakarta yang bukan penghasil utama sehingga menjadi ketergantungan dengan daerah lain dan ini akan berpengaruh pada stabilisasi harga BAPOKTING yang berpluktuatif karena beberpa faktor misalkan biaya produksi, tranposrtasi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh petani/pengusaha di daerah lain. Iklim tersebut akan berdampak pada stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting yang ada diwilayah Kota Yogyakarta sehingga mempengaruhi akses dan daya beli masyarakat secara luas dan merata.

2.2.1.1.4. Tantangan dalam mewujudkan Kota tertib ukur

Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa mempunyai keanekaragaman dunia usaha yang majemuk, dunia usaha merupakan sarana yang melibatkan kegiatan ekonomi, bisnis dan komersial. Kegiatan ini tidak terlepas dari interaksi antar pihak yakni pelaku usaha maupun konsumen yang saling mendukung, dalam hal ini peranan penting pemerintah melalui metrologi legal yang memiliki fungsi dalam meningkatkan pelayanan metrologi legal dengan tujuan mewujudkan tertib ukur bagi pelaku usaha dibidang barang dan jasa dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terdiri dari SPBU, pasar rakyat, pasar modern, toko emas dan jasa ekspedisi dilakukan dalam rangka mewujudkan perdagangan yang adil dan jujur. Menciptakan jaminan perlindungan konsumen melalui kebenaran hasil pengukuran atas Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang.
Pada tahun 2024 terdapat 18.000 alat UTTP yang menjadi target pelayanan tera/tera ulang, berdasarkan fakta pelaku usaha yang telah mendapatkan tanda tera sah mencapai 17.993 alat UTTP hal ini sebagai indikasi adanya Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penggunaan alat UTTP sangat tinggi dan berpotensi pada keberlanjutan usaha yang lebih berkembang.

2.2.1.1.5. Terbatasnya fasilitasi pengembangan promosi dan pemasaran produk dalam negeri

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kebudayaan dan wisata, melalui kreatifitas dan inovasi menjadi sebuah pilihan ruang dan akses yang mendukung berkembangnya produk dalam negeri ditingkat global, nasional dan regional. Pengembangan promosi dan pemasaran produk dalam negeri merupakan bentuk perwujudan untuk pengembangan produk dalam negeri dalam memfasilitasi pelaku

usaha/UMKM terutama pada produk unggulan ciri khas Kota Yogyakarta yang di konsep berdasarkan kurasi, desain, kemasan, pangsa pasar dan potensi daerah yang akan di pasarkan melalui kegiatan pengembangan promosi dan pemasaran produk dalam negeri antara lain penyelengaraan pameran produk dalam negeri, kemitaraan dengan toko modern, kemitraan dengan pelaku e commerce, pelatihan literasi digital maupun desain produk hal ini untuk mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan meningkatkan relasi bisnis yang lebih luas dan juga sebagai potensi daerah pada produk unggulan ciri khas Kota Yogyakarta untuk dikenal lebih luas. Pada tahun 2024 pelaku usaha yang telah dilibatkan sebanyak 357 peserta melalui berbagai event seperti, Pameran Jakarta Fair, Bali ITT Expo, Pameran Indonesia City Expo, Disdagfest#2, Kemitraan Toko Modern dan Kemitraan Pelaku E-commerce.

2.2.1.1.6. Terbatasnya SDM yang mempunyai kompetensi yang berdaya guna dan produktif

SDM merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan oraganisasi dalam mencapai tujuan, seiring berjalannya waktu SDM terus mengalami penurunan jumlah SDM karena mempunyai batas maksimal masa kerja hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dan berlanjut kondisi ini akan mengalami dinamika yang mempengaruhi kinerja untuk mencapai kondisi yang efektif dan logis, oleh karena itu tingkat produktifitas dan berdaya guna menjadi sebuah pilihan alternatif agar pencapaian tujuan organisasi tercapai. Pada tahun 2024 jumlah pegawai ASN Dinas Perdagangan sejumlah 68 ASN. Namun demikian pemenuhan formasi anjab yang memadai mengalami dinamika karena berbagai faktor yang berakibat belum adanya formasi anjab yang sesuai dengan kebutuhan ditingkat daerah maupun perangkat daerah.

2.2.1.2. Kondisi Lingkungan Hidup Berdasarkan laporan Kajian Lingkung Hidup Strategis (KLHS)

Identifikasi isu strategis Pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 telah dilakukan berdasarkan hasil sintetis isu antara lain hasil penjaringan isu Pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan permasalahan daerah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup di kota Yogyakarta, status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, data skunder terkait dan GAP TBP kota Yogyakarta. Kondisi lingkungan hidup melalui KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 telah didapatkan dari hasil sintesa yaitu dikelompokan berdasarkan pengintegrasian KLHS RPJMD.

Keluaran hasil KLHS RPJMD dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan gambaran umum, tujuan, sasaran dalam dokumen RPJMD. Usulan rekomendasi yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD disesuaikan dengan kebutuhan pada dokumen RPJMD.

2.2.1.2.1. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus diupayakan penuntasannya. Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta tersebut menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi sosial, ekonomi, infrastruktur wilayah, dan kebijakan publik. Dengan konteks multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, maka diperlukan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dengan fokus intervensi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Selain itu, perlu pengembangan kebijakan yang tidak hanya fokus melihat penyelesaian kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan akses ke layanan sosial, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Secara komparatif, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi maupun nasional. Data terakhir tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,26%, masih jauh di bawah angka kemiskinan DIY sebesar 10,40% atau angka kemiskinan nasional sebesar 8,57%. Meskipun kondisi faktual menunjukkan tren yang semakin membaik selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun konteks kemiskinan masih tetap perlu mendapatkan highlight prioritas sebagai permasalahan pembangunan yang akan terus diupayakan penyelesaiannya pada periode pembangunan ke depan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan terputusnya rantai kemiskinan melalui berbagai intervensi pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Perhatian utama dalam upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta ini adalah berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang selama ini masih belum optimal. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Selain itu fakta bahwa standar minimal upah bagi pekerja yang relatif rendah dibandingkan kota besar lain di Indonesia juga memberikan pengaruh, terutama terhadap penduduk yang bekerja pada sektor non-formal.

Pada konteks Dinas Perdagangan, berkaitan dengan permasalahan pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang secara tidak langsung memiliki konstribusi yang saling mendukung, permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi sosial, ekonomi, insprastrukur wilayah dan kebijakan publik. Pada tataran sosial, ekonomi memiliki perananan yang saling berkaitan terutama pada fungsi pelayanan dan ketersediaan sarana sebagai akses penguatan dan keberlanjutan aktifitas yang mendorong pada peningkatan ekonom, sebagai contoh kongkrit pemanfaatan sarana distribusi perdagangan dalam hal ini adalah pasar rakyat sebagai roda penggerak perekonomian dengan berbagai aktivitas dan fungsi di dalamnya menjadi bagian dalam penentuan parameter pengendalian inflasi daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian dari sisi stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan tujuan memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan harga bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan stakeholder terkait sebagai upaya menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting di Kota Yogyakarta.

2.2.1.2.2. Ketimpangan Pendapatan yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta. Secara konseptual, ketimpangan pendapatan mengindikasikan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara penduduk Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut kemudian berpotensi menimbulkan dampak terusan berupa masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.

Nilai indeks gini Kota Yogyakarta tercatat menjadi yang paling tinggi di DIY, bahkan melebihi nilai indeks gini nasional. Sementara itu indeks gini DIY tercatat merupakan yang paling tinggi dibandingkan wilayah provinsi lain. Artinya, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta yang diukur menggunakan indeks gini terindikasi menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, nilai indeks gini Kota Yogyakarta teridentifikasi 0,449 atau masuk dalam kategori moderat, sedangkan DIY 0,435 dan nasional 0,381. Nilai indeks gini tertinggi tercatat pada tahun 2022 mencapai 0,519 yang masuk pada kategori ketimpangan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa sudah adanya pertumbuhan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya inklusif dan masih perlu intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Data proporsi penguasaan pendapatan antar kelompok pendapatan semakin memperkuat kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta. Dengan melihat

data tahun 2024 pada BPS Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah sebesar 14,70%, maka masuk dalam kategori kondisi ketimpangan sedang sesuai kategorisasi versi bank dunia. Namun demikian, apabila mengacu pada data tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah sebesar 11,58%, maka Kota Yogyakarta masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Kondisi lain yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan peningkatan yang signifikan dari penguasaan pendapatan pada 20% penduduk berpendapatan tertinggi dari 50,24% di tahun 2020 menjadi 52,20% di tahun 2024. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan proporsi penguasaan pendapatan pada kelompok ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, tren penurunan persentase penguasaan pendapatan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah dan 40% penduduk berpendapatan menengah perlu menjadi kondisi yang ditekankan sebagai pertimbangan dalam perumusan bentuk intervensi dan arah kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta.

Penyelesaian permasalahan ketimpangan pendapatan dilakukan sekaligus dalam rangka memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus didorong ke depan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada kategori tertentu, namun dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh kalangan. Sebagai tindak lanjut, maka orientasi pengembangan kebijakan penyelesaian permasalahan kesenjangan tidak hanya terfokus pada upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi bagi kelompok 40% pendapatan terendah tetapi juga peningkatan dan penjagaan kemampuan ekonomi bagi kelompok 40% pendapatan menengah.

Pada konteks Dinas Perdagangan, prmasalahan ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta berdasarkan data BPS diatas bahwa penekanan penguasaan pendapatan penduduk yang dikatagorikan pendapatan terendah dan pendapatan menengah menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang secara tidak langsung perangkat daerah memiliki konstribusi yang saling mendukung, senyampang dengan itu dalam konteks perdaganagn pengembangan akses pemasaran dan promosi salah satu fungsi yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan cakupan wilayah yang lebih luas pada pengenalan produk dan jaringan relasi bisnis yang berpotensi pada peningkatan omzet penjualan, selain itu fungsi pasar rakyat yang mempunyai keanekaragaman aktivitas sosial, ekonomi yang mampu menggerakan roda perekonomian di Kota Yogyakarta dengan berbagai karatekristik yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan di pasar rakyat. Oleh karena itu perlu menjadi kondisi yang ditekankan sebagai pertimbangan dalam perumusan bentuk intervensi dan arah kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan.

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Isu global

Dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian, Kota Yogyakarta perlu memahami berbagai dinamika eksternal yang memiliki potensi besar mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berbagai risiko global yang berpotensi terjadi menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas kondisi kehidupan perkotaan secara global, termasuk kota Yogyakarta.

2.2.2.1.1. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global merupakan kondisi ketika arah dan stabilitas perekonomian dunia sulit diprediksi akibat interaksi kompleks antara faktor geopolitik, dinamika pasar internasional, krisis energi, serta disrupsi rantai pasok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan antarnegara, konflik bersenjata di berbagai kawasan, serta perubahan kebijakan ekonomi proteksionis dari negara-negara besar. Salah satu

contoh signifikan adalah konflik yang terjadi di Eropa Timur, yang berdampak luas terhadap pasokan energi, stabilitas harga pangan, dan perdagangan global. Selain itu, ketegangan dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bentuk saling menaikkan tarif dan pembatasan teknologi menjadi simbol dari geoeconomic confrontation yang kian terbuka, di mana masing-masing negara mencoba memproteksi ekonomi dalam negerinya dari pengaruh eksternal.

Di kawasan Asia Tenggara, tensi geopolitik di Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan dan dapat berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya memicu ketidakpastian politik dan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur pelayaran internasional dan stabilitas hubungan dagang antarnegara. Di sisi lain, berbagai peristiwa seperti fluktuasi tajam harga komoditas global, inflasi internasional akibat krisis pasokan pasca pandemi, hingga ancaman resesi di negara-negara maju semakin memperbesar kompleksitas tantangan ekonomi global. Semua kondisi ini saling terkait dan berkontribusi terhadap suasana ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk di tingkat domestik dan lokal.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa pendidikan, dan ekonomi kreatif, ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah risiko strategis. Penurunan minat perjalanan internasional, pembatasan perdagangan barang kreatif, dan perlambatan investasi akibat kehati-hatian pelaku ekonomi dapat secara langsung menekan pertumbuhan sektor unggulan kota. Selain itu, potensi naiknya harga bahan baku impor, terbatasnya pasokan logistik, serta perubahan preferensi konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi global juga dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketergantungan terhadap mobilitas dan arus barang lintas wilayah menjadikan Yogyakarta rentan terhadap gangguan ekonomi eksternal, yang jika tidak diantisipasi sejak awal, berisiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing kota di tingkat nasional maupun regional.

Sejalan dengan Kota Yogyakarta, pada **konteks Dinas Perdagangan** ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah resiko strategis yang berdampak pada pertumbuhan sektor unggulan Kota Yogyakarta. Adanya tekanan inflasi global berdampak pada potensi naiknya harga bahan baku impor dan terbatasanya pasokan logistik di Yogyakarta terutama pada komoditas barang kebutuhan pokok yang mempunyai ketergantungan dengan daerah lain sebagai pemasok dapat mempengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan komoditas di pasar rakyat maupun sarana distribusi perdagangan lainnya yang secara langsung dapat menimbulkan ketidakpastian harga dan ketersedian barang kebutuhan pokok yang dapat dijangkau konsumen yang beresiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing ditingkat regional maupun lokal.

2.2.2.1.2. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat

Salah satu isu utama yang disoroti dalam Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum adalah meningkatnya risiko terkait polarisasi sosial dan penyebaran misinformasi yang meluas di berbagai belahan dunia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mempercayai informasi. Namun, kecepatan disrupsi teknologi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dan hoaks. Ketidaksiapan literasi digital inilah yang menyebabkan ruang publik, terutama media sosial, menjadi arena yang sangat rentan terhadap konflik narasi, disinformasi terorganisir, hingga terpolarisasinya opini masyarakat dalam berbagai isu politik, agama, dan identitas.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga sangat relevan di Indonesia. Beberapa peristiwa politik nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola peningkatan ketegangan sosial yang muncul dari perbedaan pilihan politik. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi dukungan yang sering kali bersifat antagonistik antar kelompok. Serangan verbal, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye berbasis misinformasi menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan pusat budaya yang terbuka, juga berpotensi terpapar oleh dinamika tersebut. Terlebih lagi, dengan tingkat penetrasi internet yang cenderung tinggi, masyarakat Kota Yogyakarta menjadi kelompok pengguna aktif media sosial yang sangat mungkin terdampak oleh konten-konten provokatif dan narasi yang memecah belah. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan layanan publik di dalam kota juga berpotensi memperbesar jarak sosial antar kelompok masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kombinasi antara disinformasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan ini dapat melemahkan kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar komunitas, serta memperburuk stabilitas sosial dan tata kehidupan perkotaan di Yogyakarta.

Sejalan dengan Kota Yogyakarta **pada konteks Dinas Perdagangan** sebagai fasilitator penggerak ekonomi terutama pada sarana distribusi perdagangan mempunyai konsep yang sama terhadap dinamika disrupsi informasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan yang meningkat disebabkan oleh pemanfaatan media komunikasi seperti penggunaan internet sebagai akses pemenuhan kebutuhan yang memiliki kencendrungan informasi yang tidak valid sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi secara umum.

2.2.2.2. Isu Nasional

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis di berbagai sektor, mulai dari transformasi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan sosial-ekonomi. Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata nasional, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berdampak pada Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan kota ke depan.

2.2.2.2.1. Peran Perangkat Daerah dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional

Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Program prioriatas Renstra pada Kementerian Perdagangan RI seperti peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah dan maupun global, peningkatan ekspor, peningkatan kualitas produk, persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Konsep ini pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal. Kota Yogyakarta mempunyai potensi besar untuk berkonstribusi terhadap pencapaian target nasional terutama pada penapaian nilai PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konstribusi nilai ekspor dan perdagangan domestik antar wilayah. Sejalan dengan program prioritas nasional maupun daerah Dinas Perdagangan mempunyai konstribusi terhadap pencapaian nasional dan daerah melalui peningkatan ekspor, peningkatan kualitas produk, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

2.2.2.3. Isu Regional

Selain dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, pembangunan Kota Yogyakarta juga sangat terkait dengan perkembangan kebijakan, fenomena, dan agenda strategis di tingkat regional, khususnya di wilayah DIY. Berbagai kebijakan kewilayahan, penetapan status warisan budaya dunia, hingga dinamika pembangunan sosial-ekonomi di DIY menjadi faktor penting yang membentuk peluang, tantangan, dan risiko bagi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis regional menjadi krusial dalam merumuskan arah pembangunan kota yang sinkron dengan konteks keistimewaan daerah dan dinamika regional yang terjadi. Pada kerangka

2.2.2.3.1. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah

Di tingkat regional, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan untuk mendukung Misi kedua yaitu Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian misi kedua, dalam pencapaian misi diatas erat kaitanya dengan isu strategis DIY yaitu masih tingginya ketimpangan Wilayah yang kemudian di jabarkan dalam konteks kewenangan Dinas Perindag DIY mempunyai peranan penting untuk menyelaraskan kondis dan isu yang berkembang berdasarkan urusan perdagangan yaitu 1) Keterbatasan IKM berorientasi ekspor menuju pasar global, 2) Peningkatan pemasaran dalam dan luar negeri, dan 3) Peningkatan perlindungan konsumen

Sejalan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada konteks **Dinas Perdagangan** menjadi bagian dalam pencapaian misi DIY maupun penyelarasan isu yang berkembang di Tingkat Regional pada urusan Perdagangan mempunyai konstribusi yang sangat penting terhadap capaian mendukung pengembangan produk yang berorientasi ekspor, penguatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen berkaitan dengan layanan metrologi legal maupun pengawasan sektor perdagangan.

2.2.2.4. Isu Strategis Daerah

2.2.2.4.1. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta merupakan isu strategis yang harus segera diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi, tantangan besar tetap ada dalam memastikan distribusi ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin pada angka Indeks Gini yang relatif tinggi. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat berimplikasi negatif pada banyak hal, seperti peningkatan ketegangan sosial, rendahnya mobilitas sosial, dan berkurangnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang semakin sulit diatasi, di mana kelompok berpendapatan tinggi terus berkembang sementara kelompok berpendapatan rendah semakin terpinggirkan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang tidak merata. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun penting, masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran. Belum optimalnya program

pengentasan kemiskinan untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan kemudian mengurangi dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, akses terhadap lapangan kerja yang layak juga belum merata, dengan sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi tersedia di sektor formal, sementara banyak masyarakat masih mengandalkan sektor informal yang pendapatannya tidak stabil dan rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Pada perspektif lain, pemberdayaan sektor UMKM menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi kota. Namun, pelaku UMKM faktanya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam akses permodalan, kurangnya skill, maupun rendahnya tingkat literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan yang efektif, sehingga kesulitan dalam memperbesar skala usaha mereka. Tanpa dukungan yang memadai, sektor UMKM jelas akan kesulitan untuk berkembang dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal di Kota Yogyakarta.

Dalam konteks pariwisata, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar berkaita dengan pengembangan pariwisata berbasis kewilayahan yang belum sepenuhnya digali. Keberagaman budaya bersama dengan kreativitas masyarakatnya, menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaksiapan untuk memaksimalkan potensi kewilayahan ini salah satunya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam mengembangkan pariwisata berbasis kewilayahan secara berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan pada hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kota Yogyakarta juga memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan festival dan event, baik pada skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat Yogyakarta memberikan ruang bagi penyelenggaraan berbagai jenis acara yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif lokal.

Namun, tantangannya selama ini adalah kurangnya sinergi dan integrasi seluruh pihak yang terkait. Festival-festival yang selama ini terselenggara cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem yang kuat. Dalam konteks tersebut, tantangan ke depan adalah terkait dengan fasiltasi dalam mengembangkan ekosistem festival yang meliputi manajemen acara, pengelolaan sumber daya, serta promosi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara sektor kreatif, pariwisata, dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas festival sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian kota.

Dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan festival, Kota Yogyakarta dapat memperkuat posisi sebagai kota kreatif yang berdaya saing global, sambil memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta.

2.2.2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.2.5.1. Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perdagangan

Kota Yogyakarta berada pada titik strategis wilayah yang berhimpitan dengan kabupaten lainnya di wilayah D.I. Yogyakarta seperti kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, bahkan Jawa Tengah. Titik

stratgeis wilayah Kota Yogyakarta mempunyai peranan strategis meliputi berbagai sektor yaitu, sektor pendidikan, sektor kebudayaan, dan sektor perdagangan. Pada konteks sektor perdagangan dari sisi perniagaan yang semakin diminati dan berkembang akan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, pada prinsipnya tertib niaga memberikan peran yang sangat penting untuk mendorong adanya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta, berbagai aspek yang mendorong tertib niaga antara lain, aspek hukum atau legalitas, aspek etika dan aspek ekonomi ketiganya saling berkaitan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan efisiensi. Merujuk ketentuan pemerintah pada pemenuhan indikator kinerja kunci pada urusan perdagangan mempunyai tugas dan fungsi pengawasan perizinan bagi pelaku usaha dan pelayanan metrologi legal, maka itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan regulasi agar terciptanya kondusifitas perniagaan yang legal dan berdaya saing demi keberlangsungan ekonomi dan memenuhi hak-hak konsumen pada umumnya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang efektif dan berkelanjutan dilakukan dengan menjalin komunikasi, kolaborasi bersama stakeholder terkait agar terwujudnya tertib niaga dan perlindungan konsumen di Kota Yogyakarta.

2.2.2.5.2. Pasar Rakyat Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan Dan Pusat Perekonomian

Sarana distribusi perdagangan di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah Pasar Rakyat merupakan tempat aktifitas ekonomi atau perdagangan yang memiliki ciri khas dalam kegiatan jual beli pada skala besar maupun kecil, pasar rakyat juga sebagai pusat perekonomian lokal yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimana terdapat interaksi sosial dan latar belakang budaya dengan karakteristik khusus terutama pada konsep tradisional dengan tradisi leluhur yang mengidentikan sejarah masa lalu yang terus berlangsung dan berkembang hingga saat ini. Keberadaan pasar rakyat saat ini mulai mengalami perkembangan kultur, budaya, ekonomi dengan keberagaam sosial masyarakat yang ada didalammnya termasuk regulasi yang mengatur pasar rakyat, dengan semboyan pasar ora ilang kumandange mempunyai makna tinggi terhadap stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat yang kental dengan nuansa tradisional dan dapat diakses oleh siapapun tanpa mengenal status sosial, menumbuhkan kebersamaan untuk berkembang dan menandakan hidupnya suatu perekonomian wilayah. Untuk menunjang keberlangsungan ekonomi wilayah tentu saja pasar rakyat harus tetap ada dan terjaga bahkan menjadi pionir terhadap ketidakstabilan ekonomi yang semakin meprihatinkan, tentu saja dukungan fisik pasar yang layak dan memadai dan memenuhi kaidah-kaidah tentang standar minimal dalam memenuhi aspek fisik, manajemen, sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu pasar rakyat merupakan aset vital Pemerintah Kota Yogyakarta melalui fungsi dan regulasi yang berkembang pasar rakyat sebagai aset vital dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan penerimaan asli daerah yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengembangan fungsi pasar yang dapat dioptimlakan sebagai pelayanan dan peningkatan objek pendapatan sebagai penerimaan daerah berfungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi pelayanan yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pentinngya kolaborasi lintas sektor dalam menentukan kebijakan dan standar minimal untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan pada sektor ekonomi sehingga pasar rakyat di Kota Yogyakarta refresentatif dan bersaing.

2.2.2.5.3. Kemudahan Akses Ketersediaan Dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Dan Barang Penting Di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai pusat distribusi perdagangan mempunyai pengaruh yang kuat terhadapa perekonomian suatu daerah, terletak pada titik strategis berada dipusat kota, pemerintahan dan wilayah geografis kabupaten lainnya di wilayah DI Yogyakarta. Memiliki ruang dan akses vital antar kabupaten lainnya yang diakses wilayah utara, barat, selatan dan timur hal ini tentu berpotensi pada penumbuhan ekonomi yang beragam serta memberikan peluang positip untuk kemajuan daerah. Tentu saja kemudahan akses ini harus didukung dengan infrasturuktur yang memadai, regulasi yang mendukung, sarana-prasaran yang memadai agar mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan. Kemudahan akses tidak hanya pada konteks infrastruktur, regulasi, dan sarana prasarana saja akan tetapi, dalam menopang kehidupan utama harus tersediannya akses ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagai kebutuhan dasar masyrakat secara optimal dengan sistem distribusi yang efektif dan efisien yang dipengaruhi tingkat produksi utama hal ini penting agar terciptanya siklus distribusi yang efektif dan efisien yang berdampak pada stabilisasi harga yang dapat dijangkau. Oleh karena itu pentingnya efektifitas akses distribusi ketersediaan Bapokting yang optimal didukung dengan berbagai faktor terutama kolaborasi lintas sektor baik Pemerintah, Swasta, Distributor, maupun Daerah lain yang mempunyai potensi tinggi terhadap pemenuhun kebutuhan dasar yang seluruhnya dapat memberikan pengaruh terhadap stabilisasi harga bahkan stabilitas sosial, artinya masyarakat menadapkan kemudahan akses yang memadai diimbangi dengan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat menengah kebawah.

2.2.2.5.4. Pengembangan Promosi Dan Pemasaran Produk Yang Unggul dan Relevan

Potensi Kota Yogyakarta pada sektor perdagangan terutama pada penggunaan produk dalam negeri yang beraneka ragam produk yang memiliki ciri khas unggulan menjadi modal utama pengembangan produk, selaian ciri khas unggulan juga memiliki banyak desain yang berkembang hal ini dapat menambahkan nilai tersendiri pada produk di Kota Yogyakarta, selain itu yang tak kalah penting adalah produk yang berkualitas ini menjadi kekhususan produk yang bernilai tambah. Produk ciri khas unggulan Kota Yogyakarta memiliki bebrbagai macam produk seperti, produk kerajinan, Souvenir, Kuliner, batik, Craft, Fashion dan Leather/Kulit yang di produksi sebagian besar oleh UMKM pemula bahkan pada UMKM tingkat Lanju, khususnya UMKM tingkat lanjut difokuskan pada pengembangan produk yang berorientasi ekspor yang mampu bersaing pada tataran internasional sehingga memberikan konstribusi terhadap devisa negara bahkan membantu pemerintah pada pemerataan ekonomi dengan bertumbuhnya lapangan kerja secara tidak langsung. Selain itu pada konsep penguatan penggunaan produk lokal juga tidak kalah penting untuk dapat berkembang dan bersaing, kualitas, standar, desain dan kuantitas produk juga menjadi cirikhas tersendiri untuk berkembang dan menjalin hubungan relasi yang lebih luas terutama pengembangan kemitraan dan pengembangan marketplace. Melihat persaingan dan tren pasar yang berkembang hingga saat ini mendorong kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM untuk lebih kompetitif, yaitu mampu mengetahui tren, persaingan usaha, prilaku konsumen maupun pangsa pasar. Oleh karena itu pentingnya perananan pemerintah untuk memberikan fasilitasi melalui kolaborasi dan peran aktif yang dapat mendorong peningkatan promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang unggul dan relevan terhadap kondisi pasar saat ini.

2.2.2.5.5. Penguatan Kualitas SDM Yang Berwawasan Dan Produktif

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam menghasilkan

SDM yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, untuk memastikan bahwa potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan agar peningkatan kualitas SDM berjalan merata dan optimal. Pada konteks perangkat daerah isu yang berkembang saat ini Adalah mencakup beberapa permasalahan utama yang saling terkait, yaitu kualitas pelayanan perangkat daerah masih rendah, serta tantangan terhadap pelestarian adat istiadat di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Tidak hanya itu Sebagian besar SDM mengandalkan inovasi, kreatifitas dan keterampilan sebagai modal utama terutama dikalangan masyarakat yaitu pelaku usaha maupun pedagang pasar rakyat, sedangakan diinternal perangkat daerah kondisi SDM hingga saat ini mengalami berbagai dinamika yang menurukan performa karena menghadapai tantangan dan permasalahan yang kompleks dan dinamis, dengan latar belakang dan karater yang berbeda berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga adanya upaya dan alternatif sebagai jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu pentingnya penguatan kolaborasi dan peningkatan kapasitas internal melalui berbagai metode seperti, Bimtek, Pelatihan, Assesment sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang berwawasan dan produktif.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis diatas dapat menggambaran kondisi kinerja pelayanan yang perangkat daerah yang akan di tuangkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, pada kerangka teknis perumusan permasalahan dan isu trategis yang saling berkaitan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Teknis Meyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD**			**Isu Strategis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	• Intervensi pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal • Terbatasnya fasilitasi pengembangan promosi dan pemasaran produk dalam negeri • Belum terpenuhinya Standar Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta sesuai kriteria standar regulasi • Minimnya pengawasan tertib niaga sektor perdagangan • Tantangan dalam mewujudkan Kota tertib ukur	• Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	• Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global • Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	• Peran Perangkat Daerah dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional • Program Prioritas Kemendag RI: 1. peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah dan maupun global 2. peningkatan ekspor 3. peningkatan kualitas produk 4. persaingan usaha dan perlindungan konsumen	• Masih tingginya Ketimpangan Wilayah (DIY) • Keterbatasan IKM berorientasi ekspor menuju pasar global (DinPerindag DIY) • Peningkatan pemasaran dalam dan luar negeri (DinPerindag DIY) • Peningkatan perlindungan konsumen (DinPerindag DIY)	• Kemudahan Akses Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Dan Barang Penting Di Kota Yogyakarta • Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Yang Unggul dan Relevan • Pasar Rakyat Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan Dan Pusat Perekonomian • Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perdagangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut.

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 melalui visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Visi RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, yaitu **“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Sedangkan Misi pembangunan jangan menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan.
2. Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari.
3. Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
4. Misi 4:Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.
5. Misi 5: Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY.

Penyelarasan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 tersebut menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang relevan, penentuan misi yang relevan sesuai dengan pelayanan perangkat daerah pada urusan bidang perdagangan dari kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta menerapkan misi ketiga, yaitu **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”**.

3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Dinas perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dalam rangka menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 pada misi ketiga, yaitu "Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian" dengan indikator tujuan "Nilai PDRB Sektor Perdagangan", definisi operasional pada tujuan dan indikator ini untuk menentukan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi sektor perdagangan selama satu tahun berdasarkan release BPS Kota Yogyakarta.

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra Dinas perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dalam rangka untuk mencapai hasil dari tujuan renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, yaitu:

1. Sasaran 1: "Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan" dengan indikator tujuan "Volume Perdagangan", definisi operasional pada sasaran dan indikator ini untuk menentukan Nilai Omzet perdagangan yang dihasilkan oleh kegiatan survey, pelaksanaan kegiatan ekonomi pada event perdadagangan melalui pemasaran dan kemitraan selama satu tahun berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan pada pasar rakyat, area premium dan ruang ekonomi kreatif pusat bisnis dan pelaku UMKM
2. Sasaran 2: "Meningkatnya Perlindungan Konsumen" dengan indikator tujuan "Indeks Perlindungan Konsumen", definisi operasional pada sasaran dan indikator ini untuk menentukan Nilai Indeks perlindungan konsumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan pelaku usaha yang mempunyai legallitas usaha, pelaksanaan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pemantaun harga barang kebutuhan pokok di 51 komoditas pasar pantauan yang masuk dalam katagori stabil selama satu tahun
3. Sasaran 3: "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif" dengan indikator tujuan "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan", definisi operasional pada sasaran dan indikator ini untuk mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa, A (>80-90): Sangat baik, BB (>70-80): baik, B (>60-70): cukup baik, CC (>50-60): cukup, C (>30-50): buruk, D (>0-30): sangat buruk

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah menunjukan perumusan yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD 2025-2029 dijabarkan kedalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan keseluruhan RPJMD Kota Yogyakarta dan Renstra Perangkat daerah memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program Pembangunan. Konsep keterkaitan tujuan, sasaran, stratgei dan arah kebijakan tersebut dapat digambarkan berikut.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 diatas menggambaran keterkaitan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 dengan perangkat daerah dilihat pada gambar berikut.

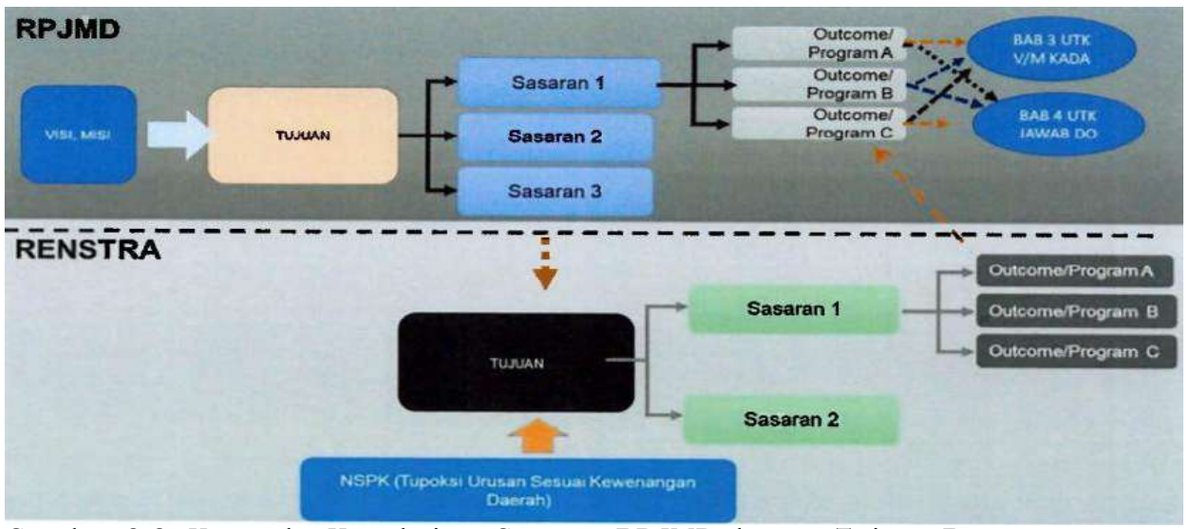

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Kerangka teknis dan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah mempunyai keterkaitan anatara RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, yang menunjukan kinerja lima tahunan dan perkiraan satu tahun berikutnya dengan memperhitungkan capaian kinerja yang logis dan relevan dengan kondisi saat itu, bukan mendasarkan pada base line maupun hasil evaluasi selama periode Renstra PD. Untuk melihat ketarkiatan tujuan dan sasaran PD ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	BASE LINE 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan											
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.490.460 .000.000	3.500.000. 000.000	3.700.000 .000.000	3.800.000. 000.000	4.000.000. 000.000	4.200.000 .000.000	4.300.000 .000.000	Rupiah
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Volume Perdagangan	N/A	322.090.7 31.100	322.841.6 84.200	323.595.3 35.000	324.351.3 86.700	325.110.0 42.500	325.110.0 42.500	Rupiah
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Perlindungan Konsumen	N/A	95,71	96,56	97,42	98,29	99,14	99,31	Persen
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	A	A (89,84-89,89)	A (89,86-89,91)	A (89,87-89,94)	A (89,87-89,94)	A (89,87-89,94)	A (89,87-89,94)	Nilai

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangan menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang

menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.2.1. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan Renstra PD tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan Gambaran secara kongkrit terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dengan mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas perdagangan Kota Yogyakarta 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik;
3. Akselerasi Pembangunan Prioritas;
4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan
5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Keterkaitan pentahapan RPJMD Kota Yogyakarta dengan Renstra PD supaya adanya keselarasan dan kesinambungan pembangunan jangka menengah maka, pentahapan Renstra PD di bagi menjadi 5 tahapan, yaitu:

1. Perumusan dan Penguatan Dasar Pembangunan Sektor Perdagangan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sektor Perdagangan

3. Akselerasi Penguatan Layanan Sektor Perdagangan yang berdaya saing
4. Pengembangan akses dan layanan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
5. Menjaga kesinambungan Prioritas Layanan Sektor Perdagangan

Untuk memudahkan dalam pentahapan Renstra PD secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumusan dan Penguatan Dasar Pembangunan Sektor Perdagangan.	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sektor Perdagangan.	Akselerasi Penguatan Layanan Sektor Perdagangan yang berdaya saing.	Pengembangan akses dan layanan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.	Menjaga kesinambungan Prioritas Layanan Sektor Perdagangan.

3.2.1.1 Lokus Pembangunan Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada periode 2025–2029, dinas perdagangan difokuskan pada penguatan pondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.2.1.2 Orientasi Pembangunan Kewilayah Berdasarkan Ruang Lingkup Sektor Ekonomi

Rencana Strategis Dinas perdagangan tahun 2025-2029 ditetapkan selaras dengan orientasi Pembangunan pada penguatan potensi daerah di sektor ekonomi produktif. Secara teknis tertuang dalam rencana Pengembangan struktur ekonomi, pengembangan pola ekonomi, serta pengembangan kawasan strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1.2.1 Pengembangan Struktur ekonomi

Struktur ekonomi merupakan efektifitas peningkatan efisiensi, kesejahteraan dan daya saing yang efisien dapat meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, keberagaman ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat dengan menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih luas serta memiliki keunggulan komparatif yang dapat meningkatkan daya saing.

Rencana pengembangan struktur ekonomi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan ekonomi menggunakan hierarki pelayanan, antaralain pusat pelayanan kegiatan pada sarana distribusi perdagangan di kawasan pasar rakyat di lokasi strategis
b. Upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat, dilakukan pengembangan sarana distribusi perdagangan yang refresentatif dan modern pada pembangunan pasar rakyat, seperti Pasar Terban.

3.2.1.2.2 Pengembangan pola ekonomi

Sejalan dengan pengembangan struktur ekonomi, pengembangan pola ekonomi juga memegang peranan penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Yogyakarta. Pola ekonomi mencerminkan standar untuk mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi pada suatu daerah, pengembangan pola ekonomi pada urusan bidang perdagangan, mencakup fungsi pola ekonomi tradisional, fungsi pola ekonomi modern

dan fungsi pola ekonomi lainnya, yang disusun untuk mewujudkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan fungsi strategis yang dimilikinya.

- Pola ekonomi tradisional

produksi dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh norma-norma sosial dan budaya.

- Pola ekonomi modern

Sistem ekonomi yang ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana harga dan produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran

- Pola ekonomi lainnya

Sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen ekonomi pasar dan ekonomi terencana dan Sistem ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijak.

3.2.1.2.3 pengembangan kawasan strategis

Pengembangan kawasan strategis adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis di lingkungan Kota Yogyakarta. Pengembangan kawasan strategis juga dibagi menjadi empat sudut pandang aspek, meliputi:

- Aspek Ekonomi

Kawasan strategis pada aspek ekonomi meliputi:

a. Pengembangan strategis daya tarik meliputi: pemanfaatan area promosi dan pemasaran sebagai pengembangan akses dan daya tarik dan minat pemanfaat
b. Peningkatan produksi/distribusi ketersedian barang kebutuhan pokok, Kerjasama antar daerah
c. Peningkatan pendapatan daerah seperti penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha serta pendapatan lain lain PAD pada pelayanan BLUD

- Aspek Sosial

d. Pengembangan kawasan strategis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, meliputi pemanfaatan lahan, perluasan akses usaha dan peningkatan omzet

- Aspek Lingkungan

e. Pengembangan kawasan strategis dapat mengurangi dampak lingkungan melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat meliputi pengaturan standar, regulasi, dan pengaturan sistem layanan

- Aspek Politik

f. Pengembangan kawasan strategis dapat meningkatkan citra daerah dan negara melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang memadai meliputi revitalisasi sektor perdagangan, penguatan akses distribusi, penyedian sarpras, dan pemanfaatan fungsi digital
g. Pengembangan kawasan strategis dapat meningkatkan stabilitas politik melalui peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meliputi penjaringan aspirasi, pengaturan kebijakan dan pengawasan kebijakan

3.2.1.3 Lokus Pembangunan Prioritas

Prioritas Nasional Asta Cita yang selaras dengan Kementerian atau Lembaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terdiri 2 Asta Cita yaitu pertama: Asta Cita ke-2 memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sedangakan kedua: Asta Cita ke 5 melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ditingkat regional DIY Pembangunan prioritas yang selaras dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan DIY terdiri dari 2 yaitu, Pertama: Prioritas ke-2 Pengembangan Ekonomi yang Layak.

Kedua: penurunan Tingkat kemiskinan dan pengahapusan kemiskinan ekstrem. Di tingkat Kota Yogyakarta prioritas pembangunan yang selaras dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu prioritas ke-3 peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyrakat.

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian melalui:		
		Meningkatkan kualitas layanan BLUD pusat bisnis	Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPT Pusat Bisnis
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar Rakyat dan UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, II dan PASTY
			Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatkan Pembinaan Dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatkan pengembangan pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha binaan	Meningkatkan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan
			Meningkatkan Akses Pemasaran Produk Melalui Kemitraan dengan Retail dan Marketplace	
		Penjagaan terhadap Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Keterjangkauan Harga Pangan dan Komoditas Pendukung Pangan melalui:		
		Meningkatkan tertib niaga pelaku usaha sektor perdagangan	Meningkatkan Pengawasan Izin usaha Toko Swalayan	Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengedalian Perdagangan
			Meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan Gudang	
			Meningkatkan Pengawasan Minuman Beralkohol	
			Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Berbahaya	

		Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengedalian Perdagangan
			Meningkatkan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Meningkatkan standardisasi metrologi legal	Meningkatkan Pelayanan Metrologi Legal Berupa Tera/Tera Ulang	UPT Metrologi Legal
			Meningkatkan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengedalian Perdagangan
		Peningkatan kinerja pembangunan daerah, melalui: a. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah b. Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam perencanaan pembangunan c. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah d. Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah e. Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah f. Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindag	Perencana Ahli Muda ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Kepala Sub Bagian Keuangan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
			Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai Dindag	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
			Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
			Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan	Sekretaris Dinas

3.2.3.Program Prioritas

Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 terdiri dari 8 program prioritas nasional. Delapan priotas nasional yang selaras dengan Kementerian/Lembaga/daerah yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Program prioriatas Renstra pada Kementerian Perdagangan RI terdapat 8 kegiatan prioritas antara lain:

- peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah dan maupun global
- peningkatan ekspor produk industri berteknologi tinggi
- peningkatan ekspor produk industri penyerap tenaga kerja tinggi
- peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan dan Industri berbasis SDA,

- peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif
- Peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vihecle (EV)
- Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai Global
- Peningkatan kualitas produk, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Konsep ini pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal. Kota Yogyakarta mempunyai potensi besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian target nasional terutama pada pencapaian nilai PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kontribusi nilai ekspor dan perdagangan domestik antar wilayah. Sejalan dengan program prioritas nasional maupun daerah Dinas Perdagangan mempunyai kontribusi terhadap pencapaian nasional dan daerah melalui peningkatan ekspor, peningkatan promosi, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- Program/Kegiatan Strategis: Program yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena urgensinya yang tinggi, program ini mendapat prioritas dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Program strategis juga menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
- Program/Kegiatan Operasional: Program yang bersifat teknis dan mendukung implementasi kebijakan strategis. Meskipun cakupannya lebih terbatas, program operasional tetap penting untuk menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam dokumen ini, program strategis dijabarkan secara terperinci pada bab sebelumnya sebagai program prioritas, sedangkan program/kegiatan operasional dijabarkan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025-2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan Renja PD tahun 2030. Pada kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyususnan Renstra Perangkat Daerah menjelaskan Kinerja pencapain target yang berisikan sasaran, indikator, outcome, output dan pagu belanja serta proyeksi selama periode tahun 2025-2030. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan renstra Perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

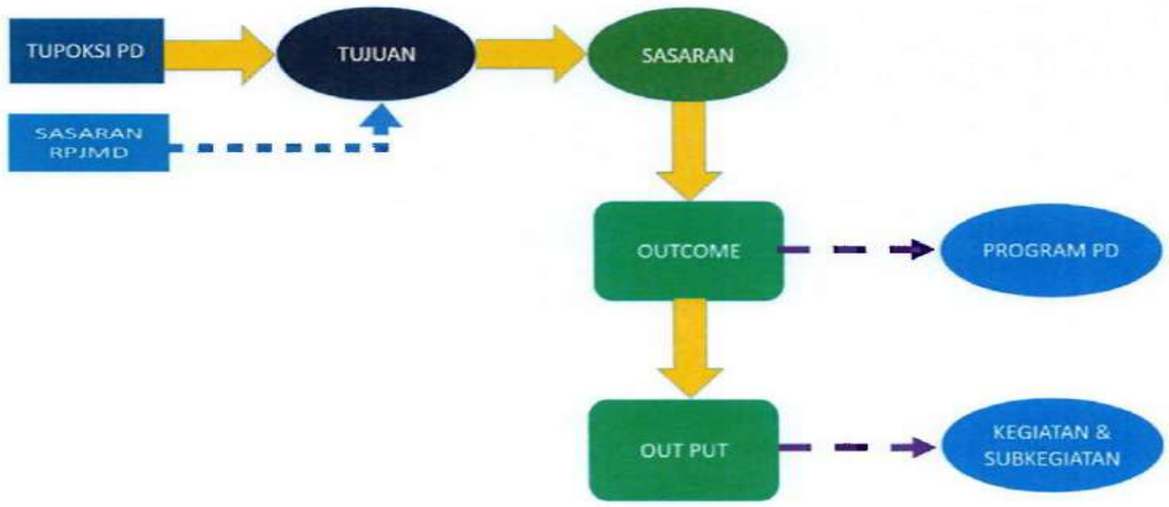

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2-025-2029 dengan menjaga keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Teknik perumusan Keterkaitan dalam pencapaian renstra Dinas dengan RPJMD melalui penjabaran program/kegiatan dan sub kegiatan PD merupakan Gambaran pada pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.2 Teknik Merumusakan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan							
Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian				Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp)		
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan			Volume Perdagangan (Rp)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan BLUD Pusat Bisnis		Pendapatan BLUD Pusat Bisnis (Rp)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Layanan BLUD Pusat Bisnis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja	3.30.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja	3.30.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola (Rp)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)		
				Persentase pengelolaan retribusi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pasar	(Unit)	Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan		Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen			Indeks Perlindungan Konsumen (Nilai)		
			Meningkatnya Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan		Persentase pelaku usaha yang tertib niaga (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
				Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Presentase Bapokting yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya Standardisasi Metrologi Legal		Persentase alat â€“ alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase layanan metrologi legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan (Predikat)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan		Nilai SPIP Dinas Perdagangan (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Rencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Perdagangan	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 mengambarkan keseluruhan rencana pencapaian tujuan dan sasaran PD dijabarkan pada program/kegiatan/sub kegiatan. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 telah memuat kinerja program/kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				222.000.000		0		0		0		0		0		
1.03.13-PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				222.000.000		0		0		0		0		0		
Meningkatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (Persentase)		100	222.000.000		0		0		0		0		0		
1.03.13.5.02-Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten			3	222.000.000		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (dokumen)		3	222.000.000		0		0		0		0		0		
1.03.13.5.02.0001-Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			3	222.000.000		0		0		0		0		0		
Terlaksannya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang SatuanRuang Strategis Sumbu (dokumen)		3	222.000.000		0		0		0		0		0		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				53.151.990.674		48.415.847.907		49.400.594.169		50.654.473.159		52.031.547.680		53.823.274.824		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.213.572.954		20.683.837.145		21.104.532.686		21.640.204.991		22.228.507.919		22.993.955.475		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan (Nilai)	A	A	14.565.728.776	A	13.465.800.266	A	13.739.685.719	A	14.088.424.509	A	14.471.427.415	A	14.969.756.802	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
	Nilai SPIP Dinas Perdagangan (Nilai)	89,24	89,24		89,24		89,24		89,24		89,24		89,24			
	Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan (Nilai)	80,69	80,69		80,69		80,69		80,69		80,69		80,69			
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.938.000		15.510.000		15.820.000		16.226.000		16.665.000		17.239.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.350.000	1	11.880.000	1	12.117.000	1	12.429.000	1	12.764.000	1	13.204.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8		11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				1			
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.320.000		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.320.000	2	1.320.000	2	1.346.000	2	1.381.000	2	1.418.000	2	1.467.000		
3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				920.000		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	1.320.000	1	1.346.000	1	1.381.000	1	1.418.000	1	1.467.000		
3.30.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				920.000		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1	1	920.000	1	1.320.000	1	1.346.000	1	1.381.000	1	1.418.000	1	1.467.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)															
3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				920.000		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	1.320.000	1	1.346.000	1	1.381.000	1	1.418.000	1	1.467.000		
3.30.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				920.000		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	1.320.000	1	1.346.000	1	1.381.000		1.418.000	1	1.467.000		
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.350.000		5.280.000		5.387.000		5.524.000		5.674.000		5.869.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	3.350.000	11	5.280.000	11	5.387.000	11	5.524.000	11	5.674.000	11	5.869.000		
Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	3.588.000	12	3.630.000	12	3.703.000	12	3.797.000	12	3.901.000	12	4.035.000		
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.588.000		3.630.000		3.703.000		3.797.000		3.901.000		4.035.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	3.588.000	12	3.630.000	12	3.703.000	12	3.797.000	12	3.901.000	12	4.035.000		
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.089.340.339		9.923.986.025		9.924.030.025		9.924.093.025		9.924.159.025		9.924.248.025		
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	2	2	11.089.340.339	2	9.923.986.025	2	9.924.030.025	2	9.924.093.025	2	9.924.159.025	2	9.924.248.025		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	76		69		69		69		69		69			
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.086.315.339		9.921.621.025		9.921.621.025		9.921.621.025		9.921.621.025		9.921.621.025		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	76	11.086.315.339	69	9.921.621.025	69	9.921.621.025	69	9.921.621.025	69	9.921.621.025	69	9.921.621.025		
3.30.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				440.000		440.000		448.000		460.000		472.000		489.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7	7	440.000	7	440.000	7	448.000	7	460.000	7	472.000	7	489.000		
3.30.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				880.000		880.000		897.000		920.000		945.000		978.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	5	880.000	5	880.000	5	897.000	5	920.000	5	945.000	5	978.000		
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				460.000		220.000		224.000		230.000		236.000		244.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	460.000	1	220.000	1	224.000	1	230.000	1	236.000	1	244.000		
3.30.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				460.000		220.000		224.000		230.000		236.000		244.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	460.000	2	220.000	2	224.000	2	230.000	2	236.000	2	244.000		
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				440.000		440.000		448.000		460.000		472.000		489.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	440.000	12	440.000	12	448.000	12	460.000	12	472.000	12	489.000		
3.30.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				345.000		165.000		168.000		172.000		177.000		183.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.000	1	172.000	1	177.000	1	183.000		
3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.140.000		1.980.000		2.016.000		2.070.000		2.124.000		2.196.000		
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.140.000	1	1.980.000	1	2.016.000	1	2.070.000	1	2.124.000	1	2.196.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan	12	12		1		1		1		1		1			

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		6		6		6		6		6			
3.30.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	690.000	1	330.000	1	336.000	1	345.000	1	354.000	1	366.000		
3.30.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	690.000	1	330.000	1	336.000	1	345.000	1	354.000	1	366.000		
3.30.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	690.000	6	330.000	6	336.000	6	345.000	6	354.000	6	366.000		
3.30.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	690.000	12	330.000	12	336.000	12	345.000	12	354.000	12	366.000		
3.30.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah pada SKPD																
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	690.000	1	330.000	1	336.000	1	345.000	1	354.000	1	366.000		
3.30.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	690.000	1	330.000	1	336.000	1	345.000	1	354.000	1	366.000		
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	690.000	2	330.000	2	336.000	2	345.000	2	354.000	2	366.000		
3.30.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				690.000		330.000		336.000		345.000		354.000		366.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	690.000	2	330.000	2	336.000	2	345.000	2	354.000	2	366.000		
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				314.753.115		299.948.935		306.046.000		313.816.000		322.346.000		333.446.000		
Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	314.753.115	4	299.948.935	4	306.046.000	4	313.816.000	4	322.346.000	4	333.446.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	6		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	85	88		70		75		80		80		80			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		6		7		8		9			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		4				5		6			
3.30.01.2.06.0002 -				112.977.115		76.082.935		77.630.000		79.600.000		81.764.000		84.580.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	112.977.115	5	76.082.935	6	77.630.000	7	79.600.000	8	81.764.000	9	84.580.000		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.696.000		17.696.000		18.055.000		18.514.000		19.017.000		19.672.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	17.696.000	3	17.696.000	4	18.055.000		18.514.000	5	19.017.000	6	19.672.000		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.450.000		40.300.000		41.119.000		42.163.000		43.309.000		44.800.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	43.450.000	7	40.300.000	7	41.119.000	7	42.163.000	7	43.309.000	7	44.800.000		
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.430.000		2.430.000		2.479.000		2.542.000		2.611.000		2.701.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	6	2.430.000	2	2.430.000	2	2.479.000	2	2.542.000	2	2.611.000	2	2.701.000		
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				138.200.000		162.120.000		165.417.000		169.616.000		174.227.000		180.226.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	85	88	138.200.000	70	162.120.000	75	165.417.000	80	169.616.000	80	174.227.000	80	180.226.000		
3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		1.320.000		1.346.000		1.381.000		1.418.000		1.467.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	4	1.320.000	4	1.346.000	4	1.381.000	4	1.418.000	4	1.467.000		
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.145.800		10.845.800		11.066.000		11.347.000		11.655.000		12.057.000		
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	65	12	65.145.800	5	10.845.800	5	11.066.000	5	11.347.000	5	11.655.000	5	12.057.000		
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.145.800		10.845.800		11.066.000		11.347.000		11.655.000		12.057.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	65	12	65.145.800	5	10.845.800	5	11.066.000	5	11.347.000	5	11.655.000	5	12.057.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)															
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.865.104.646		1.947.773.286		2.189.209.694		2.496.593.484		2.834.198.390		3.273.448.777		
Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	1.865.104.646	12	1.947.773.286	12	2.189.209.694	12	2.496.593.484	12	2.834.198.390	12	3.273.448.777		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.970.000		11.970.000		12.213.000		12.523.000		12.863.000		13.306.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	11.970.000	12	11.970.000	12	12.213.000	12	12.523.000	12	12.863.000	12	13.306.000		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.523.866.646		1.677.503.286		1.913.443.694		2.213.827.484		2.543.746.390		2.972.994.777		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	1.523.866.646	12	1.677.503.286	12	1.913.443.694	12	2.213.827.484	12	2.543.746.390	12	2.972.994.777		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				329.268.000		258.300.000		263.553.000		270.243.000		277.589.000		287.148.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	329.268.000	12	258.300.000	12	263.553.000	12	270.243.000	12	277.589.000	12	287.148.000		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.211.616.876		1.265.426.220		1.291.162.000		1.323.934.000		1.359.926.000		1.406.756.000		
Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1.211.616.876	1	1.265.426.220	1	1.291.162.000	1	1.323.934.000	1	1.359.926.000	1	1.406.756.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	283	275		276		290		290		290		290			

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	yang Dipelihara (Unit)															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48		48		48		48		48		48			
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.990.000		26.990.000		27.538.000		28.237.000		29.005.000		30.004.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.990.000	1	26.990.000	1	27.538.000	1	28.237.000	1	29.005.000	1	30.004.000		
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				679.539.400		720.435.400		735.088.000		753.746.000		774.237.000		800.898.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48	679.539.400	48	720.435.400	48	735.088.000	48	753.746.000	48	774.237.000	48	800.898.000		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.950.000		64.950.000		66.271.000		67.953.000		69.800.000		72.204.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	283	275	64.950.000	276	64.950.000	290	66.271.000	290	67.953.000	290	69.800.000	290	72.204.000		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				440.137.476		453.050.820		462.265.000		473.998.000		486.884.000		503.650.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	440.137.476	1	453.050.820	1	462.265.000	1	473.998.000	1	486.884.000	1	503.650.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan BLUD Pusat Bisnis	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis (Rp)	5.598.578.000	5.964.498.400	7.647.844.178	6.010.421.500	7.218.036.879	6.013.847.500	7.364.846.967	6.017.322.500	7.551.780.482	6.020.825.500	7.757.080.504	6.024.379.500	8.024.198.673		
3.30.01.2.10 - Peningkatan				7.647.844.178		7.218.036.879		7.364.846.967		7.551.780.482		7.757.080.504		8.024.198.673		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelayanan BLUD																
Meningkatnya Layanan BLUD Pusat Bisnis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	7.647.844.178	1	7.218.036.879	1	7.364.846.967	1	7.551.780.482	1	7.757.080.504	1	8.024.198.673		
3.30.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				7.647.844.178		7.218.036.879		7.364.846.967		7.551.780.482		7.757.080.504		8.024.198.673		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	7.647.844.178	1	7.218.036.879	1	7.364.846.967	1	7.551.780.482	1	7.757.080.504	1	8.024.198.673		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				143.327.000		56.001.000		57.140.023		58.590.343		60.183.160		62.255.591		
Meningkatnya Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga (Persentase)	98,87	97,18	143.327.000	97,74	56.001.000	98,31	57.140.023	98,87	58.590.343	99,44	60.183.160	100	62.255.591	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		0	0	0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Elektronik (Dokumen)															
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				0		990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.100.000		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	1	990.000	1	1.010.000	1	1.035.000	1	1.063.000	1	1.100.000		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				143.327.000		53.031.000		54.110.023		55.485.343		56.994.160		58.955.591		
Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi,	4	5	143.327.000	12	53.031.000	12	54.110.023	12	55.485.343	12	56.994.160	12	58.955.591		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)															
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				143.327.000		53.031.000		54.110.023		55.485.343		56.994.160		58.955.591		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	4	5	143.327.000	12	53.031.000	12	54.110.023	12	55.485.343	12	56.994.160	12	58.955.591		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				29.105.329.220		26.113.241.262		26.644.367.284		27.320.650.898		28.063.380.412		29.029.754.135		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola (Rp)	17.946.182.379	17.550.230.000	29.105.329.220	18.000.000.000	26.113.241.262	18.100.000.000	26.644.367.284	18.150.000.000	27.320.650.898	18.200.000.000	28.063.380.412	18.250.000.000	29.029.754.135	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat (Persentase)	34,48	37,93		41,38		44,83		48,28		51,72		55,17			
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12.291.795.560		6.685.555.650		6.821.536.284		6.994.679.898		7.184.834.412		7.432.247.135		
Persentase pengelolaan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	148	229	5.741.122.460	140	3.942.160.500	144	4.022.341.000	146	4.124.434.000	148	4.236.561.000	150	4.382.448.000		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5.741.122.460		3.942.160.500		4.022.341.000		4.124.434.000		4.236.561.000		4.382.448.000		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	148	229	5.741.122.460	140	3.942.160.500	144	4.022.341.000	146	4.124.434.000	148	4.236.561.000	150	4.382.448.000		
Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	145	104	6.550.673.100	110	2.743.395.150	120	2.799.195.284	130	2.870.245.898	135	2.948.273.412	140	3.049.799.135		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				6.550.673.100		2.743.395.150		2.799.195.284		2.870.245.898		2.948.273.412		3.049.799.135		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	145	104	6.550.673.100	110	2.743.395.150	120	2.799.195.284	130	2.870.245.898	135	2.948.273.412	140	3.049.799.135		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				16.813.533.660		19.427.685.612		19.822.831.000		20.325.971.000		20.878.546.000		21.597.507.000		
Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	19	15	16.813.533.660	14	19.427.685.612	14	19.822.831.000		20.325.971.000	14	20.878.546.000	14	21.597.507.000		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				16.813.533.660		18.202.752.576		18.572.984.000		19.044.401.000		19.562.135.000		20.235.765.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	19	15	16.813.533.660	14	18.202.752.576	14	18.572.984.000		19.044.401.000	14	19.562.135.000	14	20.235.765.000		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		1.224.933.036		1.249.847.000		1.281.570.000		1.316.411.000		1.361.742.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0	85	1.224.933.036	87	1.249.847.000	89	1.281.570.000	91	1.316.411.000	93	1.361.742.000		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				525.905.000		367.523.000		374.998.174		384.516.326		394.969.650		408.570.588		
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Persentase)	98,04	90,20	525.905.000	92,16	367.523.000	94,12	374.998.174	96,08	384.516.326	98,04	394.969.650	98,04	408.570.588	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				29.265.000		16.180.000		16.509.000		16.928.000		17.388.000		17.987.000		
Presentase Bapokting yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3	3	29.265.000	3	16.180.000	3	16.509.000	3	16.928.000	3	17.388.000	3	17.987.000		
3.30.04.2.01.0003 -				29.265.000		16.180.000		16.509.000		16.928.000		17.388.000		17.987.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3	3	29.265.000	3	16.180.000	3	16.509.000	3	16.928.000	3	17.388.000	3	17.987.000		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				496.640.000		350.683.000		357.816.174		366.898.326		376.872.650		389.850.588		
Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	496.640.000	12	350.683.000	12	357.816.174	12	366.898.326	12	376.872.650	12	389.850.588		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		2		2		2		2		2			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				496.640.000		124.963.000		127.504.000		130.740.000		134.295.000		138.919.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	496.640.000	12	124.963.000	12	127.504.000	12	130.740.000	12	134.295.000	12	138.919.000		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0		225.720.000		230.312.174		236.158.326		242.577.650		250.931.588		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	0	0	0	2	225.720.000	2	230.312.174	2	236.158.326	2	242.577.650	2	250.931.588		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(Satu) Kabupaten/Kota	Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)															
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		660.000		673.000		690.000		709.000		733.000		
Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	0	0	12	660.000	12	673.000	12	690.000	12	709.000	12	733.000		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0		660.000		673.000		690.000		709.000		733.000		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	0	0	12	660.000	12	673.000	12	690.000	12	709.000	12	733.000		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				378.953.750		314.072.750		320.460.782		328.594.672		337.527.731		349.150.633		
Meningkatnya Standardisasi Metrologi Legal	Persentase alat â€“ alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	99,96	99,96	378.953.750	99,96	314.072.750	99,96	320.460.782	100	328.594.672	100	337.527.731	100	349.150.633	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				378.953.750		314.072.750		320.460.782		328.594.672		337.527.731		349.150.633		
Persentase layanan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	450	600	378.953.750	450	314.072.750	450	320.460.782	450	328.594.672	450	337.527.731	450	349.150.633		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	17.993	17.993		17.993		17.993		18.000		18.000		18.000			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				232.660.000		223.704.000		228.253.000		234.047.000		240.410.000		248.688.000		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	17.993	18.000	232.660.000	17.993	223.704.000	17.993	228.253.000	18.000	234.047.000	18.000	240.410.000	18.000	248.688.000		
3.30.06.2.01.0002 -				146.293.750		90.368.750		92.207.782		94.547.672		97.117.731		100.462.633		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah	Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	450	600	146.293.750	450	90.368.750	450	92.207.782	450	94.547.672	450	97.117.731	450	100.462.633		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.006.902.750		881.172.750		899.095.220		921.915.929		946.978.808		979.588.402		
Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya (Persentase)	13,92	8	1.006.902.750	7,22	881.172.750	7,78	899.095.220	8,33	921.915.929	8,89	946.978.808	9,44	979.588.402	3.30.1.03.2.22.01.0000 - Dinas Perdagangan	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1.006.902.750		881.172.750		899.095.220		921.915.929		946.978.808		979.588.402		
Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	276	150	1.006.902.750	195	881.172.750	195	899.095.220	195	921.915.929	195	946.978.808	195	979.588.402		
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	81	50		30		30		30		30		30			
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				948.857.000		827.967.000		844.808.220		866.250.929		889.799.808		920.440.402		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	81	50	948.857.000	30	827.967.000	30	844.808.220	30	866.250.929	30	889.799.808	30	920.440.402		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				58.045.750		53.205.750		54.287.000		55.665.000		57.179.000		59.148.000		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	276	150	58.045.750	195	53.205.750	195	54.287.000	195	55.665.000	195	57.179.000	195	59.148.000		

Penyelenggaran Program Prioritas RPJMD 2025-2029 merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas Kepala daerah RPJMD 2025-2029 pada dinas Perdagangan yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:

a. Bela Beli Produk Warga
b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
c. Modernisasi Pasar Tradisional

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta keterkaitan dengan program prioritas RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah Modernisasi Pasar Tradisional sesuai dengan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2021 tentang pasar rakyat. Daftar program kegiatan yang mendukung program prioritas kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Strategis Wali Kota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		DINAS PERDAGANGAN			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1.	Modernisasi Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	• Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola • Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		UPT PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I			
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
2.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	• Pendapatan retribusi sektor perdagangan		

No.	Program Strategis Wali Kota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		PERDAGANGAN	yang dikelola • Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat		
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		UPT PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH II			
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	• Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola • Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat		
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)			
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
4.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	• Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola • Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat		
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKK mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah

secara lebih spesifik untuk menggambarkan urusan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Baik IKU maupun IKK berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor.

Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rincian IKU PD dan IKK, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam Tabel 4.4 dan Tabel 4.5

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah	3.490.460.000.000	3.500.000.000.000	3.700.000.000.000	3.800.000.000.000	4.000.000.000.000	4.200.000.000.000	4.300.000.000.000	
2.	Indeks Perlindungan Konsumen	Nilai	**N/A**	95,71	96,56	97,42	98,29	99,14	99,31	
3.	Volume Perdagangan	Rupiah	**N/A**	320.600.000.000	322.430.000.000	323.540.000.000	323.650.000.000	324.850.000.000	326.000.000.000	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	Persentase	99,96	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	Persentase	74,86	75	77,03	79,21	80,15	82,03	84,06	
3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	Persentase	98,87	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis rencana pembangunan yang mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan program prioritas Kepala Daerah, yang ditunjukkan pada Visi pembangunan Kota Yogyakarta sesuai RPJMD yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban."

Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (outcome) dan Indikator Kinerja Kunci (IKU). Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu tahun 2025-2029 dan pencapaian rencana pembangunan Kota Yogyakarta.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 2025-2029, diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban serta memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

LAMPIRAN

Pohon Kinerja Dinas Perdagangan

ULTIMATE OUTCOME
1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian
INDIKATOR KINERJA :
Nilai PDRB Sektor Perdagangan

ULTIMATE OUTCOME 1
1.1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Volume Perdagangan

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 1	INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 2	INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 3
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Layanan Blud Pusat Bisnis	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan
INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat 2. Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya

INITIAL OUTCOME 1	INITIAL OUTCOME 2	INITIAL OUTCOME 1	INITIAL OUTCOME 1
Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar Rakyat	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Layanan BLUD Pusat Bisnis	Terfasilitasinya Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik 2. Persentase pengelolaan retribusi pasar	Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan

OUTPUT 1	OUTPUT 1	OUTPUT 1	OUTPUT 1
Terlaksannaya penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Jumlah Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk unggulani dan produk berorientasi ekspor

IIMMEDIET OUTPUT 2			OUTPUT 2
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk dalam negeri yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace dan Jasa Akomodasi
INDIKATOR KINERJA :			INDIKATOR KINERJA :
1. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pengelolaan Retribusi Wil. I 2. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pengelolaan Retribusi Wil. II 3. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace dan jasa akomodasi

ULTIMATE OUTCOME 2
1.2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
INDIKATOR KINERJA :
Indeks Perlindungan Konsumen

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 4
Meningkatnya Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pelaku usaha yang tertib niaga

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 5
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
INDIKATOR KINERJA :
Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

INTERMEDIATE OUTCOME /CSF 6
Meningkatnya Standardisasi Metrologi Legal
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Alat UTTP (takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah

INITIAL OUTCOME 1
Meningkatnya Pengawasan dan Pemantauan Izin Usaha Toko Swalayan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha

OUTPUT 1
Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

INITIAL OUTCOME 2
Meningkatnya Pengawasan dan Pemantauan Gudang
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang

OUTPUT 1
Tersedianya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang

INITIAL OUTCOME 3
Meningkatnya Pengawasan Minuman Beralkohol
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C

OUTPUT 1
Tersedianya Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol

INITIAL OUTCOME 4
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya di Tingkat Kota
INDIKATOR KINERJA :
Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota

OUTPUT 1
Tersedianya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

INITIAL OUTCOME 1
Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
INDIKATOR KINERJA :
Presentase Jumlah Bapokting yang Tersedia

OUTPUT 1
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

INITIAL OUTCOME 2
Meningkatnya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
INDIKATOR KINERJA :
Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update

OUTPUT 1
Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

OUTPUT 2
Terselenggaranya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

INITIAL OUTCOME 3
Meningkatnya Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

OUTPUT 1
Terlaksanaya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%

INITIAL OUTCOME1
Meningkatnya Kinerja Layanan Metrologi Legal
INDIKATOR KINERJA :
Persentase layanan metrologi legal

OUTPUT 1
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

OUTPUT 2
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

ULTIMATE OUTCOME 3
1.3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 7
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Nilai SAKIP, Nilai SPIP

INITIAL OUTCOME 1
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindag
INDIKATOR KINERJA :
Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

- OUTPUT 1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- OUTPUT 2: Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- OUTPUT 3: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- OUTPUT 4: Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- OUTPUT 5: Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- OUTPUT 6: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

INITIAL OUTCOME 2
MeningkatnyaKemattangan statistik sektoral Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perdagangan

- OUTPUT 1: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 8
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Pengautan Keuangan dan Aset

INITIAL OUTCOME 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Pengautan Keuangan Dindag

- OUTPUT 1: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- OUTPUT 2: Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- OUTPUT 3: Terlaksanaanya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- OUTPUT 4: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- OUTPUT 5: Tersedianya Dokumen Bukan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Bukan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
- OUTPUT 6: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- OUTPUT 7: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

INITIAL OUTCOME 2
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Pengautan Aset Dindag

- OUTPUT 1: Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- OUTPUT 2: Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- OUTPUT 3: Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- OUTPUT 4: Terlaksanaanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- OUTPUT 5: Terlaksanaanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- OUTPUT 6: Terlaksanaanya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- OUTPUT 7: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diedikan

- OUTPUT 8: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- OUTPUT 9: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- OUTPUT 10: Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- OUTPUT 11: Terlaksanaanya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

INTERMEDIATE OUTCOME / CSF 9
Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

INITIAL OUTCOME 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum
INDIKATOR KINERJA :
Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag

- OUTPUT 1: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diedikan
- OUTPUT 2: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diedikan
- OUTPUT 3: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diedikan
- OUTPUT 4: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diedikan
- OUTPUT 5: Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- OUTPUT 6: Terlaksanaanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

INITIAL OUTCOME 2
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dindag
INDIKATOR KINERJA :
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag

- OUTPUT 1: Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

INITIAL OUTCOME 3
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Reaksasi Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag

- OUTPUT 1: Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- OUTPUT 2: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diedikan
- OUTPUT 3: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - INDIKATOR KINERJA : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diedikan

CASCADING KINERJA DINAS PERDAGANGAN

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
Tujuan: MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN			VOLUME PERDAGANGAN	Kepala Dinas Perdagangan
Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Sekretaris Dinas
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dindag	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag	Perencana Ahli Muda Ketua Tim Kerja PEP
			Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	Kepala Sub Bagian Keuangan
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
1.2.3	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.5	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
1.2.6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1.2.7	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.3.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.4	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.5	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.6	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
1.4.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dindag	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
1.5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.5.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.5.3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
1.5.4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.5.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5.6	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1.6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6.1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.7.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.7.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.7.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.8.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.4	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
Sasaran 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen			Indeks Perlindungan Konsumen	Kepala Dinas Perdagangan
1.	Meningkatnya Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan
1.1.	Meningkatnya Pengawasan dan Pemantauan Izin Usaha Toko Swalayan	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
1.1.1	Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Toko Swalayan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Toko Swalayan	
1.2.	Meningkatnya Pengawasan dan Pemantauan Gudang	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan
1.2.1	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	
1.3.	Meningkatnya Pengawasan Minuman Beralkohol	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan
1.3.1	Tersedianya Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol	
1.4	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan
1.4.1	Tersedianya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	
2.	Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan
2.1.	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Bapokting yang Tersedia	Analis Kebijakan Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Harga
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
2.2.	Meningkatnya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update	Analis Kebijakan Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Harga

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
2.2.1	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
2.2.1	Terselenggaranya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
2.3.	Meningkatnya Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Analis Kebijakan Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Harga
2.3.1	Terlaksannya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
3.	Meningkatnya Standardisasi Metrologi Legal	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	Kepala UPT Metrologi Legal
3.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Metrologi Legal	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase layanan metrologi legal	Kepala UPT Metrologi Legal
3.1.1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
3.1.2	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan			Volume Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Blud Pusat Bisnis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis	Kepala UPT Pusat Bisnis
1.1.	Meningkatnya Layanan BLUD Pusat Bisnis	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif	Kepala UPT Pusat Bisnis
1.1.1	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	Kepala Bidang Pasar Rakyat
			Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola	
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar Rakyat	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Pasar
			Persentase pengelolaan retribusi pasar	Kepala UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, II dan PASTY

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
2.1.1	Terlaksannaya penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
2.1.2	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pengelolaan Retribusi Wil. I	
2.1.3	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pengelolaan Retribusi Wil. II	
2.1.4	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY	
2.2.	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Kebersihan dan Keamanan Pasar dan Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Penataan Pedagang
2.2.1	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
2.2.2	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya	Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi Dan Kemiteraan Perdagangan
3.1.	Terfasilitasinya Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan	Analis Kebijakan Ketua Tim kerja Bimbingan usaha dan promosi Perdagangan dan Ketua Tim Kerja Kemiteraan dan Pengembangan Perdagangan
3.1.1	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kotai	
3.1.2	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace dan Jasa Akomodasi	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace dan jasa akomodasi	

CROSS CUTTING DINAS PERDAGANGAN

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif	
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan
Sasaran 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen	
DPMPTSP	- Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha Oss Bagi Pelaku Usaha Tokoswalayan, Gudang Dan Minhol - Pengawasan Perizinan Pelaku Usaha Dibidang Metrologi Legal
Dinas Pertanian Dan Pangan	Pengawasan Dan Pengendalian Pangan Higienis Di Tingkat Pasar Rakyat Dan Toko Modern
	Penegakan Perda Terhadap Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan, Gudang Dan Minhol
Kemantren	- Pengawasan Dan Penguatan Pemberdayaan UMKM Dengan Toko Modern Terhadap Kajian Analisis Sosial Ekonomi - Sinkronisasi Data Wilayah Terhadap Pelaksanaan Distribusi Bapokting Melalui Layanan Pasar Murah
Dinas Kesehatan	Pengawasan Dan Peningkatan Fungsi Kesehatan Pada Pangan Yang Beredar Di Pasar Rakyat Dan Toko Modern
Bagian Perekonomian Dan Kerjasama	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Dinas Perhubungan	Pengawasan dan peningkatan fungsi Akses pendistribusian Bapokting melalui jalur lalulintas di Kota Yogyakarta
DINAS KOMINFOSANDI	Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Informasi Harga Pangan
Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	
DPUPKP	Pembangungan Fisik/Konstruksi/ Revitalisasi Pasar Rakyat
BPKAD	Pengelolaan Data Dan Potensi Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat dan BLUD Pusat Bisnis
BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Dan Pengembangan Fungsi BLUD, Pasar Rakyat dan Pengembangang Kebijakan Fungsi Pemasaran Dan Promosi Perdagangan
DINAS KOMINFOSANDI	Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Pasar Rakyat

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	Pengembangan Dan Peningkatan Kerjasama Daerah di bidang urusan perdagangan dengan Lembaga, Daerah maupun Sektor Swasta
KEMANTREN	Sinkronisasi Dan Pengembangan Data UMKM Wilayah Sebagai Peserta Binaan
DINPERINKOPUKM	Sinkronisasi, Kolaborasi Dan Pengembangan Fungsi Kewenangan Intervensi UMKM Berdasarkan Klasifikasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan Dan Peningkatan Distribusi Pengelolaan Sampah Dan Rekomendasi Kajian Lingkungan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Renstra Setda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra Setda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Setda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Renstra Setda ini kami telah berusaha maksimal, namun demikian kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna karenanya saran dan masukan dari pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 15 SEP 2025

Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Aman Yuriadijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH II-1

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah II-1

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta II-1

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah II-21

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah II-35

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II-77

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan II-78

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah II-80

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah II-81

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah II-82

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah II-82

2.2.2 Isu Strategis II-91

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-1

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-3

3.3 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah III-17

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

4.1 Program Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-1

4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-1

4.3 Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif IV-3

4.4 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-117

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah IV-121

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) IV-122

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah.....II-21
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/ Grade..... II-22
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon II-22
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan II-22
Tabel 2.5 Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....II-22
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi.....II-23
Tabel 2.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2024.....II-24
Tabel 2.8 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....II-35
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024 .....II-35
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024 ...II-36
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ...II-38
Tabel 2.12 Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....II-56
Tabel 2.13 Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2024.....II-58
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta II-68
Tabel 2.15 Kelompok Sasaran Layanan II-77
Tabel 2.16 Identifikasi Permasalahan Layanan.....II-82
Tabel 2.17 Perumusan Isu Strategis.....II-91
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DaerahIII-2
Tabel 3.2 Penentuan Strategi III-4
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah III-6
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah...III-11
Tabel 3.5 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah.....III-17
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah IV-4
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan IV-13
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....IV-117
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah IV-121
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....IV-122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta II-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan penganggaran responsif gender, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan:

   a) membentuk tim berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 7 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 100.3.3/003 tanggal 3 Januari 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 188/015/I/2022 tentang Penunjukan Personil Anggota Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b) melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;

c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah
   Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
   Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
   Forum perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025. Forum tersebut membahas permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator program, target sasaran dan target program. Hasil dari forum tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah penyusunan renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
   Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika:
   I. Pendahuluan;
   II. Gambaran pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
   III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
   IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
   V. Penutup.
6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
   Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan renja yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah
3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.3 Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
4.4 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    3. Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
    1. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
        a. Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
        b. Subbagian Protokol; dan
        c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    2. Bagian Organisasi, terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan.
    3. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
        a. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
        b. Subbagian Administrasi Umum

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

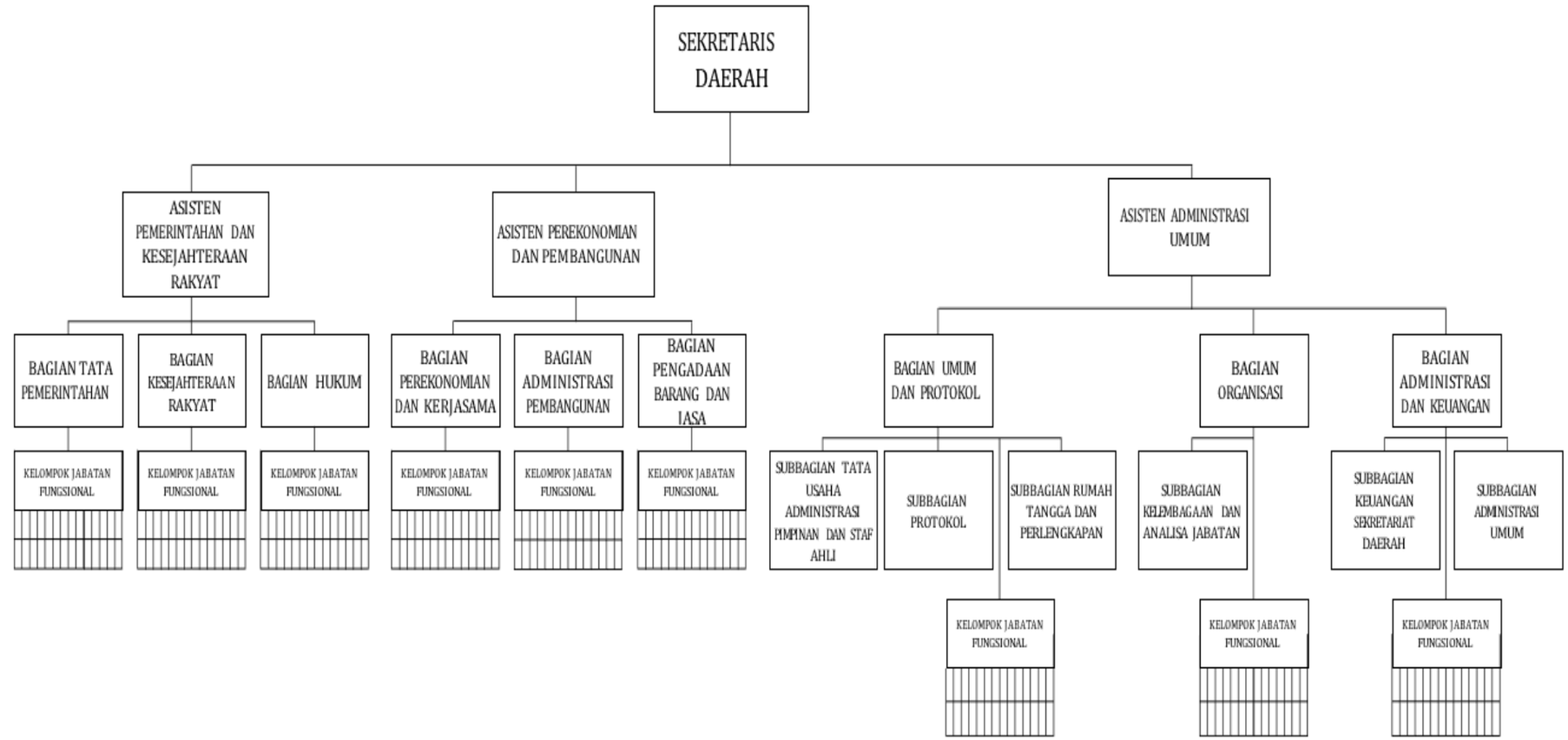

Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023

Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tugas Bagian Tata Pemerintahan:
   melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

   Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:
   1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
   2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   3) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   6) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas;
   7) penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
   8) penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;
   9) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi;
   10) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil dan monografi kelurahan;

11) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Kemantren dan kelurahan;
12) pengoordinasian kegiatan pembinaan administrasi Kemantren dan kelurahan;
13) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren;
14) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan;
15) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah Kemantren dan/atau kelurahan;
16) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
17) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemilihan dan fasilitasi pelepasan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
18) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan pembentukan kelembagaan kampung;
19) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
20) pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Kemantren dan Kelurahan;
21) penyiapan bahan penetapan kepengurusan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
22) fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
23) penyiapan bahan kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;
24) penyiapan bahan dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Mantri Pamong Praja;
25) monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana kelurahan dan dana keistimewaan pada Kemantren dan kelurahan;
26) penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27) penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28) fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
29) monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;
30) fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
31) fasilitasi pengusulan izin dan cuti Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk alasan kepentingan pencalonan Walikota, Wakil Walikota, atau anggota legislatif;
32) penyusunan bahan Memori Jabatan Walikota;
33) koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah;
34) fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
35) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;

36) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
37) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
38) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;
39) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
40) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
41) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
7) penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama;
8) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
9) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
10) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
11) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

12) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
13) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
14) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
15) fasilitasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan keagamaan;
16) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
20) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan kampung;
21) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah;
22) penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong;
23) fasilitasi dan koordinasi forum stakeholder dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;
24) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;
25) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
26) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
27) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
30) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

31) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Bagian Hukum:
penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:
1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
6) penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
7) harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
8) penyiapan bahan sambutan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
9) penyiapan bahan kajian produk hukum Daerah;
10) pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
11) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
12) pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13) fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
14) pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
15) pengoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
16) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

17) penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
18) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
19) pelayanan administrasi informasi produk hukum;
20) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
23) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
24) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
25) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas Bagian Administrasi Pembangunan:
melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:
1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan;
4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;
5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
6) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan;
7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sinergitas kebijakan program prioritas pembangunan;
8) penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan;
9) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
10) pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
11) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

12) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas Pembangunan;
13) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
14) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan;
15) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
16) koordinasi dan sinkronisasi evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
17) penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
18) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
19) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
20) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa orang perseorangan;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;
23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;
24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;
25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

5. Tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
6) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan Badan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum;
7) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
8) pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
9) monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
10) penyiapan bahan dan penyusunan data serta analisa di bidang pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif;
11) pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan data usaha mikro dan ekonomi kreatif;
12) fasilitasi dan koordinasi forum kemitraan ekonomi kreatif;
13) fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian perekonomian;
14) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif;
15) fasilitasi pelaksanaan kerja sama Daerah;
16) pengelolaan data kerja sama Daerah;
17) fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
18) pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah;
19) pengendalian kerja sama Daerah;
20) pemantauan dan evaluasi kerja sama Daerah;
21) penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah;
22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
23) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

24) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
25) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
26) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
27) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

6. Tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
6) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
7) fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
8) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
9) fasilitasi pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;
10) fasilitasi penyiapan data dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
11) fasilitasi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;

12) fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
13) fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
14) pengoordinasian pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
15) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
16) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
17) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
18) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
19) fasilitasi pengelolaan informasi kontrak;
20) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
21) fasilitasi manajemen sumber daya keahlian pengadaan barang/jasa;
22) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
23) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
24) fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
25) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
26) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
27) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
30) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas Bagian Umum dan Protokol:
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;
10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

a. Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli

Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli : menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha dan administrasi pimpinan dan Staf Ahli Walikota.

Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan dan Staf Ahli Walikota;
3. pengelolaan administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Staf Ahli yang meliputi kegiatan persuratan dan penyelenggaraan rapat-rapat pimpinan yang difasilitasi oleh Bagian Umum dan Protokol;
4. pengelolaan tata usaha umum, keuangan dan kepegawaian Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
5. fasilitasi dan penyiapan bahan rapat dinas dan rapat koordinasi terbatas;

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol;
7. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol;
9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
10. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja pada Bagian Umum dan Protokol;
11. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
12. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Umum dan Protokol;
13. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
14. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Kepala Subbagian Protokol

Tugas Kepala Subbagian Protokol :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,fasilitasi,pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan protokol.

Fungsi Kepala Subbagian Protokol :

1. penyusunan perencanaan kegiatanSubbagian Protokol;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan pimpinan;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
4. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
5. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
7. pelaksanaan operasional teknis pendampingan tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
8. pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan operasional teknis tenaga ahli Walikota;

9. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan untuk kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan tamu Pemerintah Daerah;
10. pelaksanaan pengurusan ijin perjalanan dinas (exit permit) ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota;
11. pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang meliputi kegiatan persuratan;
12. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Protokol;
13. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Protokol;
14. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Subbagian Protokol;
15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Protokol; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

c. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Fungsi Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
3. pelaksanaan urusan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
4. perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
5. pengelolaan rumah dinas serta prasarana dan sarana pendukung rumah dinas Walikota dan Wakil Wakil Walikota;
6. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana di lingkungan balaikota yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;
7. pelaksanaan pengelolaan taman luar gedung di lingkungan komplek Balaikota Yogyakarta;
8. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung acara kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

8. Tugas Bagian Administrasi dan Keuangan :

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
6) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
7) penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
8) fasilitasi pelaksanaaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat Daerah;
9) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
10) pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian pada Sekretariat Daerah;
11) fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
12) penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;

13) penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;
14) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;
15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
16) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
17) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
19) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

a. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah

Tugas Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan keuangan Sekretariat Daerah.

Fungsi Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Sekretariat Daerah;
3. penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
4. bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
5. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
7. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi Sekretariat Daerah;
8. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Bagian Administrasi dan Keuangan;
9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;
10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;

11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Keuangan Sekretariat Daerah;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

b. Kepala Subbagian Administrasi Umum

Tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum.

Fungsi Kepala Subbagian Administrasi Umum :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum;
2. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang administrasi umum;
3. penyiapan bahan dan fasilitasi pengoordinasian kebijakan strategis di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan kepegawaian;
4. penatausahaan barang milik Daerah pada Sekretariat Daerah;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan barang Sekretariat Daerah;
6. fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset Sekretariat Daerah;
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, aset, analisis jabatan dan beban kerja pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
8. fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
9. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
10. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Administrasi Umum;
11. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
12. pengelolaan kearsipan Subbagian Administrasi Umum;
13. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
14. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah;
15. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Administrasi Umum;
16. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas Bagian Organisasi:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;
7) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
8) pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9) pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
10) monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
11) penyiapan bahan dan penyusunan ketatalaksanaan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
12) monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;
13) fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
14) pendampingan penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
15) monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
16) pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
17) koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
18) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Perangkat Daerah;
19) penyiapan bahan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;

20) pengoordinasian dan pendampingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

a. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

Tugas Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kelembagaan dan analisa jabatan.

Fungsi Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan :

1. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan;
3. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi susunan organisasi kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi tugas dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
6. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja;
7. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan kelembagaan, tugas, fungsi dan analisis jabatan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
8. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
9. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

10. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan keistimewaan dibidang kelembagaan;
11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 153 orang ASN (data per bulan Desember 2024), terdiri dari 147 orang PNS dan 6 orang PPPK. Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 287 orang (berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 489 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dengan demikian baru terpenuhi 53,31%. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
ASN	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 orang
Asisten Administrasi Umum	1 orang
Staf Ahli	2 orang
Kepala Bagian	8 orang
Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja	27 orang
Fungsional/ Pelaksana/ PPPK	115 orang
Non ASN	
JLOP	71 orang
TOTAL	**227 orang**

Data per 30 Juni 2025

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan / Grade

Golongan / Grade	Jumlah
IV (ASN)	17 orang
III (ASN) dan IX (PPPK)	121 orang
II (ASN) dan VII (PPPK)	18 orang
TOTAL	**156 orang**

Data per 30 Juni 2025

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II	6 orang
III	8 orang
IV / Ketua Tim Kerja	27 orang
Fungsional / Pelaksana/ PPPK	115 orang
TOTAL	**156 orang**

Data per 30 Juni 2025

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	27 orang	17,30%
S1	89 orang	57,05%
D3	14 orang	8,97%
SMA/SMK	26 orang	16,67%
TOTAL	**156 orang**	**100%**

Data per 30 Juni 2025

Tabel 2.5 Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	3 orang	4,22%
S1 / D4	36 orang	50,70%
D3	7 orang	9,86%
SMA/SMK	24 orang	33,80%

SMP	1 orang	1,41%
TOTAL	**71 orang**	**100%**

Data per 30 Juni 2025

Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Oraganisasi	Golongan			JLOP	Jumlah
	IV	III	II		
Sekretaris Daerah	1				1 orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1				1 orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1				1 orang
Asisten Administrasi Umum	1				1 orang
Staf Ahli	2				2 orang
Bagian Umum dan Protokol					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		15	4		19 orang
Staf non ASN (JLOP)				36	36 orang
Bagian Organisasi					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		13	1		14 orang
Staf non ASN (JLOP)				3	3 orang
Bagian Tata Pemerintahan					
Kepala Bagian	1				1 orang
Ketua Tim Kerja		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		8	1		9 orang
Staf non ASN (JLOP)				5	5 orang
Bagian Kesejahteraan Rakyat					
Kepala Bagian	1				1 orang
Ketua Tim Kerja	1	2			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		7			7 orang
Staf non ASN (JLOP)				3	3 orang
Bagian Hukum					
Kepala Bagian	1				1 orang
Ketua Tim Kerja	1	2			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		12	1		13 orang
Staf non ASN (JLOP)				3	3 orang
Bagian Administrasi dan Keuangan					

Oraganisasi	Golongan			JLOP	Jumlah
	IV	III	II		
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		3	5		8 orang
Staf non ASN (JLOP)				7	7 orang
Bagian Administrasi Pembangunan					
Kepala Bagian	1				1 orang
Ketua Tim Kerja		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		5	1		6 orang
Staf non ASN (JLOP)				7	7 orang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					
Kepala Bagian	1				1 orang
Ketua Tim Kerja	1	2			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		24	3		27 orang
Staf non ASN (JLOP)				4	4 orang
Bagian Perekonomian dan Kerjasama					
Kepala Bagian					-
Ketua Tim Kerja		3			3 orang
Staf (Fungsional, Pelaksana, PPPK)		10	2		12 orang
Staf non ASN (JLOP)				3	3 orang
TOTAL	**17**	**121**	**18**	**71**	**227 orang**

Data per 30 Juni 2025

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
1	1.3.02.01.03.0004.002	Portable Generating Set	Unit	4	794.463.669,98
2	1.3.02.01.03.0004.003	Stationary Generating Set	Unit	1	152.889.397,60
3	1.3.02.01.03.0005.003	Stationary Water Pump	Buah	1	1.000.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
4	1.3.02.01.03.0005.010	Pompa Air	Unit	19	60.675.312,19
5	1.3.02.02.01.0001.001	Sedan	Unit	1	635.104.559,80
6	1.3.02.02.01.0001.003	Station Wagon	Unit	26	6.565.357.670,60
7	1.3.02.02.01.0001.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	Unit	3	1.383.000.000,00
8	1.3.02.02.01.0002.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	840.000.000,40
9	1.3.02.02.01.0002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	1.036.000.000,00
10	1.3.02.02.01.0003.002	Pick Up	Unit	1	92.500.000,00
11	1.3.02.02.01.0004.001	Sepeda Motor	Unit	42	581.748.758,68
12	1.3.02.02.02.0002.001	Sepeda	Unit	8	20.773.728,38
13	1.3.02.03.01.0001.005	Mesin Bor	Unit	1	821.500,00
14	1.3.02.03.02.0005.002	Tool Kit Box	Buah	1	599.950,00
15	1.3.02.03.03.0001.072	Global Positioning System	Unit	2	14.150.000,00
16	1.3.02.03.03.0001.102	Ozonizer	Unit	3	2.310.000,00
17	1.3.02.03.03.0009.000	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Unit	11	7.321.506,71
18	1.3.02.04.01.0002.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Unit	2	2.000.000,00
19	1.3.02.05.01.0001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Unit	3	2.200.000,00
20	1.3.02.05.01.0001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Unit	4	5.930.000,00
21	1.3.02.05.01.0001.003	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inci)	Unit	1	3.000.000,00
22	1.3.02.05.01.0001.004	Mesin Ketik Listrik	Buah	1	2.975.000,00
23	1.3.02.05.01.0002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	8	1.714.425,00
24	1.3.02.05.01.0004.000	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Unit	19	253.827.371,98
25	1.3.02.05.01.0004.001	Lemari Besi/Metal	Unit	33	61.390.240,88
26	1.3.02.05.01.0004.002	Lemari Kayu	Unit	67	395.445.738,70
27	1.3.02.05.01.0004.003	Rak Besi	Unit	11	28.472.086,77
28	1.3.02.05.01.0004.004	Rak Kayu	Unit	25	104.863.315,78
29	1.3.02.05.01.0004.005	Filing Cabinet Besi	Unit	58	196.079.114,75
30	1.3.02.05.01.0004.007	Brandkas	Unit	6	17.378.000,00
31	1.3.02.05.01.0004.013	Buffet	Unit	5	66.060.255,95

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
32	1.3.02.05.01.0004.018	Kontainer	Buah	1	609.500,00
33	1.3.02.05.01.0004.020	Lemari Display	Unit	1	4.022.369,50
34	1.3.02.05.01.0004.026	Lemari Sorok	Unit	25	80.354.963,60
35	1.3.02.05.01.0004.027	Lemari Kaca	Unit	13	58.098.078,12
36	1.3.02.05.01.0004.029	Key Box/Kotak Penyimpan Kunci (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor)	Buah	1	350.000,00
37	1.3.02.05.01.0005.000	ALAT KANTOR LAINNYA	Unit	4	1.740.500,00
38	1.3.02.05.01.0005.002	CCTV - Camera Control Television System	Unit	4	39.588.632,11
39	1.3.02.05.01.0005.002	CCTV	Unit	1	23.000.000,00
40	1.3.02.05.01.0005.003	Papan Visual/Papan Nama	Unit	4	25.247.108,50
41	1.3.02.05.01.0005.005	White Board	Unit	9	16.990.135,14
42	1.3.02.05.01.0005.010	Alat Penghancur Kertas	Unit	6	22.674.000,00
43	1.3.02.05.01.0005.019	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	14.000.000,00
44	1.3.02.05.01.0005.020	Headmachine Besar	Unit	1	490.000,00
45	1.3.02.05.01.0005.032	White Board Electronic	Unit	2	26.910.000,00
46	1.3.02.05.01.0005.033	Laser Pointer	Unit	14	6.848.975,00
47	1.3.02.05.01.0005.043	LCD Projector/Infocus	Unit	32	249.346.833,27
48	1.3.02.05.01.0005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	10	10.232.019,12
49	1.3.02.05.01.0005.076	Papan Nama Instansi	Unit	1	1.205.157,89
50	1.3.02.05.01.0005.081	Teralis	Buah	1	3.500.000,00
51	1.3.02.05.01.0005.091	Backdrop	Unit	7	108.983.451,00
52	1.3.02.05.02.0001.000	MEUBELAIR	Unit	48	188.930.725,10
53	1.3.02.05.02.0001.002	Meja Kerja Kayu	Unit	83	294.807.272,96
54	1.3.02.05.02.0001.003	Kursi Besi/Metal	Unit	62	36.371.700,00
55	1.3.02.05.02.0001.004	Kursi Kayu	Unit	68	21.341.356,62
56	1.3.02.05.02.0001.005	Sice	Unit	17	63.526.627,24
57	1.3.02.05.02.0001.008	Meja Rapat	Unit	180	408.128.375,95
58	1.3.02.05.02.0001.010	Tempat Tidur Kayu	Unit	15	91.145.600,00
59	1.3.02.05.02.0001.011	Meja Ketik	Unit	8	1.745.000,00
60	1.3.02.05.02.0001.012	Meja Telepon	Unit	25	8.934.689,85
61	1.3.02.05.02.0001.013	Meja Podium	Unit	2	4.925.000,00
62	1.3.02.05.02.0001.014	Meja Resepsionis	Unit	3	28.536.044,16
63	1.3.02.05.02.0001.016	Meja Tambahan	Unit	8	9.325.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
64	1.3.02.05.02.0001.017	Meja Panjang	Unit	5	25.058.037,42
65	1.3.02.05.02.0001.018	Meja Bundar	Unit	1	300.000,00
66	1.3.02.05.02.0001.024	Meja 1/2 Biro	Unit	75	113.487.283,74
67	1.3.02.05.02.0001.025	Kasur/Spring Bed	Unit	11	55.192.808,77
68	1.3.02.05.02.0001.028	Meja Makan Kayu	Unit	15	174.073.220,50
69	1.3.02.05.02.0001.030	Kursi Rapat	Unit	773	323.222.466,63
70	1.3.02.05.02.0001.031	Kursi Tamu	Unit	5	20.589.500,00
71	1.3.02.05.02.0001.032	Kursi Putar	Unit	220	250.190.769,03
72	1.3.02.05.02.0001.033	Kursi Biasa	Unit	30	55.740.000,00
73	1.3.02.05.02.0001.035	Bangku Tunggu	Unit	5	10.422.534,34
74	1.3.02.05.02.0001.036	Kursi Lipat	Unit	24	6.640.035,67
75	1.3.02.05.02.0001.039	Meja Komputer	Unit	35	33.918.102,63
76	1.3.02.05.02.0001.041	Partisi	Unit	9	71.933.375,09
77	1.3.02.05.02.0001.046	Cubikal	Unit	26	199.085.000,00
78	1.3.02.05.02.0001.048	Sofa	Unit	30	326.959.435,10
79	1.3.02.05.02.0001.049	Meja Rias	Unit	5	21.000.000,00
80	1.3.02.05.02.0001.051	Meja Tamu (Meubelair)	Unit	3	4.250.000,00
81	1.3.02.05.02.0001.054	Lain-Lain Meubelair	Unit	3	135.000.000,00
82	1.3.02.05.02.0002.000	ALAT PENGUKUR WAKTU	Unit	7	1.299.942,28
83	1.3.02.05.02.0002.001	Jam Mekanis	Unit	14	19.150.664,63
84	1.3.02.05.02.0002.003	Jam Elektronik	Unit	22	7.103.166,69
85	1.3.02.05.02.0003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	5	11.401.040,45
86	1.3.02.05.02.0003.003	Mesin Pemotong Rumput	Unit	2	1.515.000,00
87	1.3.02.05.02.0003.004	Mesin Cuci	Unit	1	7.315.000,00
88	1.3.02.05.02.0003.005	Air Cleaner	Unit	1	1.450.000,00
89	1.3.02.05.02.0003.007	Tempat Sampah	Buah	1	1.402.000,00
90	1.3.02.05.02.0004.000	ALAT PENDINGIN	Unit	21	145.785.823,66
91	1.3.02.05.02.0004.001	Lemari Es	Unit	22	58.250.586,15
92	1.3.02.05.02.0004.003	A.C. Window	Unit	1	8.000.000,00
93	1.3.02.05.02.0004.004	A.C. Split	Unit	102	594.689.132,43
94	1.3.02.05.02.0004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Unit	8	245.700.000,00
95	1.3.02.05.02.0004.006	Kipas Angin	Unit	27	34.849.535,35
96	1.3.02.05.02.0004.007	Exhause Fan	Unit	17	7.695.741,83

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
97	1.3.02.05.02.0004.018	Air Purifier (alat pendingin)	Buah	1	1.400.000,00
98	1.3.02.05.02.0005.000	ALAT DAPUR	Unit	2	1.550.763,29
99	1.3.02.05.02.0005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	7	8.537.674,92
100	1.3.02.05.02.0005.008	Kitchen Set	Unit	3	28.364.000,00
101	1.3.02.05.02.0005.009	Tabung Gas	Unit	3	1.559.766,06
102	1.3.02.05.02.0005.015	Rak Piring Alumunium	Buah	2	1.295.000,00
103	1.3.02.05.02.0005.025	Thermos Air	Unit	1	1.126.700,00
104	1.3.02.05.02.0005.026	Wastafel Portabel	Unit	1	1.320.000,00
105	1.3.02.05.02.0006.000	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Unit	61	303.295.638,83
106	1.3.02.05.02.0006.002	Televisi	Unit	65	906.892.588,02
107	1.3.02.05.02.0006.006	Equalizer	Unit	3	7.250.000,00
108	1.3.02.05.02.0006.007	Loudspeaker	Unit	53	621.421.252,52
109	1.3.02.05.02.0006.008	Sound System	Unit	9	264.317.906,53
110	1.3.02.05.02.0006.012	Wireless	Unit	6	32.955.583,50
111	1.3.02.05.02.0006.014	Microphone	Unit	17	38.142.890,00
112	1.3.02.05.02.0006.015	Microphone Floor Stand	Unit	5	2.929.000,00
113	1.3.02.05.02.0006.016	Microphone Table Stand	Unit	5	608.001,00
114	1.3.02.05.02.0006.017	Mic Conference	Unit	5	13.500.000,00
115	1.3.02.05.02.0006.018	Unit Power Supply/UPS	Unit	7	7.375.000,00
116	1.3.02.05.02.0006.020	Stabilisator	Unit	4	30.000.000,00
117	1.3.02.05.02.0006.021	Camera Video	Unit	6	83.274.610,97
118	1.3.02.05.02.0006.027	Alat Hiasan	Unit	4	700.000,00
119	1.3.02.05.02.0006.028	Lambang Garuda Pancasila	Unit	13	635.000,00
120	1.3.02.05.02.0006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	32	9.577.200,00
121	1.3.02.05.02.0006.030	Lambang Korpri/Dharma Wanita	Unit	1	35.000,00
122	1.3.02.05.02.0006.032	Tiang Bendera	Unit	6	99.834.000,00
123	1.3.02.05.02.0006.033	Pataka	Unit	1	250.000,00
124	1.3.02.05.02.0006.036	Tangga Aluminium	Unit	8	15.436.991,72
125	1.3.02.05.02.0006.037	Kaca Hias	Unit	15	8.133.000,00
126	1.3.02.05.02.0006.038	Dispenser	Unit	55	119.425.858,54
127	1.3.02.05.02.0006.039	Mimbar/Podium	Unit	2	4.980.000,00
128	1.3.02.05.02.0006.044	Lambang Instansi	Unit	4	4.419.319,50
129	1.3.02.05.02.0006.057	Karpet	Unit	4	94.658.006,52

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
130	1.3.02.05.02.0006.058	Vertikal Blind	Unit	9	45.081.750,00
131	1.3.02.05.02.0006.059	Gordyin/Kray	Unit	18	100.192.000,00
132	1.3.02.05.02.0006.074	Bracket Standing Peralatan	Unit	12	31.808.000,00
133	1.3.02.05.02.0006.080	Wheel Bin/Tempat Sampah (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	4	6.000.000,00
134	1.3.02.05.02.0006.082	Speaker Portable	Buah	1	1.880.000,00
135	1.3.02.05.02.0006.084	Penyemprot Otomatis Ruangan	Buah	8	3.999.996,00
136	1.3.02.05.02.0006.087	Horizontal Blind	Unit	1	49.700.000,00
137	1.3.02.05.02.0007.001	Alat Pemadam/Portable	Unit	18	19.147.101,60
138	1.3.02.05.03.0001.001	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Unit	1	2.345.000,00
139	1.3.02.05.03.0001.002	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil B	Unit	1	2.345.000,00
140	1.3.02.05.03.0001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	4	13.097.000,00
141	1.3.02.05.03.0001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	10.840.190,00
142	1.3.02.05.03.0001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3	4.257.600,00
143	1.3.02.05.03.0001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	43	172.988.072,40
144	1.3.02.05.03.0002.000	MEJA RAPAT PEJABAT	Unit	1	2.960.934,26
145	1.3.02.05.03.0002.001	Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Unit	1	1.500.000,00
146	1.3.02.05.03.0002.002	Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Unit	1	26.150.000,00
147	1.3.02.05.03.0002.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Unit	10	38.381.167,90
148	1.3.02.05.03.0002.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Unit	1	7.480.000,00
149	1.3.02.05.03.0002.006	Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Unit	2	8.000.000,00
150	1.3.02.05.03.0002.013	Meja Operator	Unit	4	2.870.000,00
151	1.3.02.05.03.0003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Unit	2	10.200.000,00
152	1.3.02.05.03.0003.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil	Unit	2	5.845.998,00
153	1.3.02.05.03.0003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	5	19.605.442,95
154	1.3.02.05.03.0003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	6	22.106.818,00
155	1.3.02.05.03.0003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	3	14.700.000,00
156	1.3.02.05.03.0003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	78	144.560.136,75
157	1.3.02.05.03.0004.001	Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Unit	12	42.000.000,00
158	1.3.02.05.03.0004.002	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil G	Unit	46	77.280.000,00
159	1.3.02.05.03.0004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	23	27.763.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
160	1.3.02.05.03.0004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	13	15.342.000,00
161	1.3.02.05.03.0005.000	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Unit	4	1.166.000,00
162	1.3.02.05.03.0005.001	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupa	Unit	4	7.800.000,00
163	1.3.02.05.03.0005.002	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lejauat Eselon I/Waki	Unit	1	750.000,00
164	1.3.02.05.03.0005.004	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	774.033,41
165	1.3.02.05.03.0005.006	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	9	4.814.036,93
166	1.3.02.05.03.0006.001	Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali	Unit	2	7.130.000,00
167	1.3.02.05.03.0006.002	Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Waki	Unit	1	6.131.782,38
168	1.3.02.05.03.0006.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	2	6.065.000,00
169	1.3.02.05.03.0006.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Unit	3	12.263.564,76
170	1.3.02.05.03.0007.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	3	32.226.556,41
171	1.3.02.05.03.0007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	18	129.383.500,00
172	1.3.02.05.03.0007.008	Buffet Kayu	Unit	4	10.990.000,00
173	1.3.02.06.01.0001.000	PERALATAN STUDIO AUDIO	Unit	28	159.486.627,39
174	1.3.02.06.01.0001.001	Audio Mixing Console	Unit	4	28.925.000,00
175	1.3.02.06.01.0001.002	Audio Mixing Portable	Unit	2	10.700.000,00
176	1.3.02.06.01.0001.003	Audio Mixing Stationer	Unit	1	3.800.000,00
177	1.3.02.06.01.0001.005	Audio Amplifier	Unit	3	30.700.000,00
178	1.3.02.06.01.0001.016	Compact Disc Player	Unit	1	4.617.101,37
179	1.3.02.06.01.0001.026	Audio Filter	Unit	5	6.001.000,00
180	1.3.02.06.01.0001.035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Unit	2	7.600.000,00
181	1.3.02.06.01.0001.036	Microphone/Wireless MIC	Unit	12	55.601.435,67
182	1.3.02.06.01.0001.037	Microphone/Boom Stand	Unit	4	5.970.000,00
183	1.3.02.06.01.0001.041	Professional Sound System	Unit	1	20.400.000,00
184	1.3.02.06.01.0001.042	Audio Master Control Unit	Unit	6	60.507.390,87
185	1.3.02.06.01.0001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	8	9.833.336,00
186	1.3.02.06.01.0001.055	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1	19.050.000,00
187	1.3.02.06.01.0001.059	Power Amplifier	Unit	12	182.424.000,00
188	1.3.02.06.01.0001.064	Chairman/Audio Conference	Unit	8	118.093.137,28
189	1.3.02.06.01.0001.075	Digital Audio Taperecorder	Unit	1	975.000,00
190	1.3.02.06.01.0001.078	Microphone Cable	Unit	8	13.560.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
191	1.3.02.06.01.0001.080	Celling Mount Bracket	Unit	1	2.790.000,00
192	1.3.02.06.01.0001.096	Audio Processor Digital	Unit	2	22.395.000,00
193	1.3.02.06.01.0002.002	Off Air TV Monitor	Unit	3	39.480.000,00
194	1.3.02.06.01.0002.024	Video Processor	Unit	1	19.000.000,00
195	1.3.02.06.01.0002.045	Tripod Camera	Unit	7	15.844.000,00
196	1.3.02.06.01.0002.055	Lighting Stand Tripod	Unit	2	1.000.000,00
197	1.3.02.06.01.0002.057	Slide Projector	Unit	2	13.798.400,00
198	1.3.02.06.01.0002.061	Lensa Kamera	Unit	1	19.258.500,00
199	1.3.02.06.01.0002.116	Head Set	Unit	8	6.845.600,00
200	1.3.02.06.01.0002.126	Camera Digital	Unit	17	196.973.182,72
201	1.3.02.06.01.0002.130	Video Conference	Unit	3	37.275.000,00
202	1.3.02.06.01.0002.133	LCD Monitor	Unit	1	18.550.000,00
203	1.3.02.06.01.0002.157	Clipp On	Set	6	27.150.000,00
204	1.3.02.06.01.0002.163	Camera Conference	Buah	4	7.655.000,00
205	1.3.02.06.01.0002.164	Stabilizer Kamera (Gimbal Stabilizer)	Unit	1	6.659.000,00
206	1.3.02.06.01.0002.165	Andoer Kamera	Unit	1	831.500,00
207	1.3.02.06.01.0004.005	Mesin Cetak Elektronik	Unit	3	12.714.000,00
208	1.3.02.06.01.0004.047	Mesin Cacah	Unit	1	17.435.873,99
209	1.3.02.06.01.0005.007	Sketch Master	Unit	3	1.505.000,00
210	1.3.02.06.02.0001.001	Telephone (PABX)	Unit	8	4.200.000,00
211	1.3.02.06.02.0001.003	Pesawat Telephone	Unit	6	1.510.000,00
212	1.3.02.06.02.0001.004	Telephone Mobile	Buah	3	21.914.000,00
213	1.3.02.06.02.0001.006	Handy Talky (HT)	Unit	37	134.835.173,99
214	1.3.02.06.02.0001.007	Telex	Unit	2	3.763.744,64
215	1.3.02.06.02.0001.010	Facsimile	Unit	6	9.561.905,40
216	1.3.02.06.03.0008.001	Antene VHF/FM Portable	Unit	1	1.413.750,00
217	1.3.02.07.01.0001.000	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Unit	3	4.800.000,00
218	1.3.02.07.01.0001.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Unit	1	1.000.000,00
219	1.3.02.07.01.0002.032	Bracket Holder	Unit	1	843.267,00
220	1.3.02.07.02.0005.025	Thermogun	Unit	3	3.936.500,00
221	1.3.02.08.01.0006.055	Alat Pemeriksa Beton	Unit	1	52.803.906,04
222	1.3.02.08.01.0006.062	Concrette Hammer Set	Unit	1	20.070.000,00
223	1.3.02.08.01.0056.081	Meja Kerja	Unit	1	1.975.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
224	1.3.02.08.08.0015.005	Lighting Equipment	Set	1	5.280.000,00
225	1.3.02.10.01.0002.001	P.C Unit	Unit	173	1.751.753.259,15
226	1.3.02.10.01.0002.002	Lap Top	Unit	18	246.300.000,00
227	1.3.02.10.01.0002.003	Note Book	Unit	116	1.051.600.126,26
228	1.3.02.10.01.0002.009	Tablet PC	Unit	1	18.798.001,00
229	1.3.02.10.02.0001.012	Hard Disk	Unit	6	6.802.500,00
230	1.3.02.10.02.0003.000	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Unit	1	131.000,00
231	1.3.02.10.02.0003.002	Monitor	Unit	3	5.626.826,65
232	1.3.02.10.02.0003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	87	361.830.782,00
233	1.3.02.10.02.0003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	17	103.215.730,23
234	1.3.02.10.02.0003.017	External/ Portable Hardisk	Unit	51	48.194.624,00
235	1.3.02.10.02.0003.018	Webcam (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2	16.829.000,00
236	1.3.02.10.02.0004.001	Server	Unit	2	798.000,00
237	1.3.02.10.02.0005.000	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Unit	4	3.221.882,04
238	1.3.02.10.02.0005.001	Uninterupted Power Supply (UPS)	Unit	27	40.796.847,40
239	1.3.02.10.02.0005.003	Videotron (Peralatan Komputer Lainnya)	Set	2	719.000.000,00
240	1.3.02.15.04.0005.006	Air Conditioning (AC)	Unit	11	75.708.000,00
241	1.5.04.01.01.0001.002	Sumersible Pump	Unit	1	2.835.000,00
JUMLAH KIB B					27.946.506.266.,43
242	1.3.03.01.01.0001.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	M2	3	154.870.000,00
243	1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	11	17.863.210.279,48
244	1.3.03.01.01.0001.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	M2	3	228.526.246,75
245	1.3.03.01.01.0008.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	M2	3	4.936.896.311,48
246	1.3.03.01.01.0010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	M2	7	165.555.463,32
247	1.3.03.01.01.0010.003	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	M2	1	1.500.000,00
248	1.3.03.01.01.0012.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	M2	1	385.840.000,00
249	1.3.03.01.01.0013.001	Gedung Pos Jaga Permanen	M2	6	247.211.386,97
250	1.3.03.01.01.0014.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	M2	2	117.130.000,00
251	1.3.03.01.01.0014.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	M2	1	15.017.500,00
252	1.3.03.01.01.0025.001	Bangunan Lantai Jemur Permanen	M2	1	300.929.968,06
253	1.3.03.01.01.0032.001	Bangunan Tempat Parkir	M2	2	39.963.600,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
254	1.3.03.01.01.0033.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	M2	3	801.829.614,34
255	1.3.03.01.01.0036.001	Taman Permanen	M2	24	622.071.679,75
256	1.3.03.01.01.0036.002	Taman Semi Permanen	M2	2	395.400.000,00
257	1.3.03.01.01.0036.003	Kandang Hewan (Taman)	M2	1	39.909.965,70
258	1.3.03.01.02.0001.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	M2	3	8.582.950.287,10
259	1.3.03.02.01.0002.003	Tugu Peringatan Lainnya	M2	1	450.472.241,28
260	1.3.03.04.01.0004.001	Pagar Permanen	M2	1	356.982.545,53
JUMLAH KIB C					35.706.267.089,76
261	1.3.04.02.05.0005.001	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	M2	2	196.029.419,90
262	1.3.04.03.03.0003.002	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	M2	1	98.658.000,00
263	1.3.04.04.02.0002.000	JARINGAN DISTRIBUSI	M2	1	47.244.507,30
JUMLAH KIB D					341.931.972,20
264	1.3.05.01.01.0001.000	BUKU UMUM	Unit	54	4.036.615,04
265	1.3.05.01.01.0001.003	Ilmu Pengetahuan Umum	Unit	526	41.057.190,00
266	1.3.05.01.01.0001.004	Bibliografi, Katalog	Unit	5	316.000,00
267	1.3.05.01.01.0001.005	Ilmu Perpustakaan	Buah	1	58.500,00
268	1.3.05.01.01.0001.006	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Unit	224	32.211.120,00
269	1.3.05.01.01.0001.010	Harian	Exemplar	19	1.195.000,00
270	1.3.05.01.01.0003.001	Agama Islam	Unit	11	704.499,99
271	1.3.05.01.01.0004.000	BUKU ILMU SOSIAL	Unit	21	1.053.600,00
272	1.3.05.01.01.0004.001	Sosiologi	Unit	5	245.825,00
273	1.3.05.01.01.0004.003	Ilmu Politik	Unit	7	353.600,00
274	1.3.05.01.01.0004.004	Ekonomi	Unit	24	2.360.000,00
275	1.3.05.01.01.0004.005	Hukum	Unit	25	3.553.200,00
276	1.3.05.01.01.0004.006	Administrasi, Pertahanan dan Keamanan	Unit	3	369.800,00
277	1.3.05.01.01.0004.007	Service Umum Sosial	Unit	7	357.000,00
278	1.3.05.01.01.0004.008	Pendidikan	Unit	1	135.000,00
279	1.3.05.01.01.0004.009	Perdagangan	Unit	1	85.000,00
280	1.3.05.01.01.0005.000	BUKU ILMU BAHASA	Unit	1	79.000,00
281	1.3.05.01.01.0005.001	Umum	Unit	3	245.000,00
282	1.3.05.01.01.0005.003	Pengetahuan Bahasa Inggris	Buah	1	145.000,00
283	1.3.05.01.01.0007.000	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	Unit	31	3.160.020,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
				Barang	Nilai Aset
284	1.3.05.01.01.0007.001	Ilmu Kedokteran	Buah	4	296.250,00
285	1.3.05.01.01.0007.003	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Unit	1	73.000,00
286	1.3.05.01.01.0007.005	Management dan Perkantoran	Unit	5	310.300,00
287	1.3.05.01.01.0008.007	Musik	Unit	3	102.600,00
288	1.3.05.01.01.0009.003	Sejarah	Exemplar	2	325.000,00
289	1.3.05.01.03.0001.002	Atlas	Unit	1	21.000,00
290	1.3.05.02.01.0001.002	Alat Musik Modern/Band	Unit	14	69.185.000,00
291	1.3.05.02.03.0001.001	Piala	Unit	18	2.235.000,00
292	1.3.05.02.03.0001.003	Piagam	Unit	1	35.000,00
293	1.3.05.05.01.0001.003	Tanaman Perkebunan	Unit	3	275.000,00
JUMLAH KIB E					164.579.120,03
294	1.5.03.01.01.0005.000	SOFTWARE	0	6	250.462.450,00
295	1.5.03.01.01.0006.000	KAJIAN	0	58	6.618.201.945,00
JUMLAH KIB ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)					6.868.664.395,00

Data per 31 Desember 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 2.8 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Predikat	Sangat baik	Sangat baik (86,8)	100%

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengukuran IKK menghasilkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Indeks kualitas kebijakan (IKK) ini dinilai selama 2 (dua) tahun sekali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 35 tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengampu ketugasan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sehingga indikator IKK relevan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mengawal penyusunan dan keberhasilan kebijakan daerah. Penilaian terakhir IKK adalah di tahun 2023, dengan nilai 86,8 dengan kategori “sangat baik”.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persen	42,86	40,00	93,33%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skala	Sedang (skala 3,29-3,34)	Sedang (3,29)	100,00 %
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	Indeks	75,34	93,01	123,45 %
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	94,80	99,56	105,02 %
5.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A-	A (nilai 4,53)	100,67 %
6.	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A (89,86)	100,00 %

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan analisa capaian kinerja sasaran strategis merupakan langkah penting untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai rencana. Melalui proses ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan program maupun kegiatan yang dilaksanakan serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	**INDIKATOR TUJUAN**																	
	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah					- tujuan sama dengan sasaran -	- tujuan sama dengan sasaran -	- tujuan sama dengan sasaran -	- tujuan sama dengan sasaran -	Sangat Baik	- tujuan sama dengan sasaran -	- tujuan sama dengan sasaran -	- tujuan sama dengan sasaran -	Sangat Baik (86,8)				100%
II	**INDIKATOR SASARAN**																	
I.1a	Indeks Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung					40,59	40,59	40,59	_	_	41,49	42,19	_	_	102,22%	103,94%	_	_
I.1b	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat					_	_	_	40%	42,86%	_	_	40%	40%	_	_	100,00%	93,33%
I.2a	Nilai Evaluasi Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)					Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	_	_	Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (3,4581)	_	_	100%	100%	_	_
I.2b	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					_	_	_	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Sedang (Skala 3,29-3,34)	_	_	Sedang (3,29)	Sedang (3,29)	_	_	96,48%	100%
I.3	Indeks Perekonomian					-	64,62	69,73	71,32	75,34	68	73,05	77,09	93,21	105,23%	104,76%	108,09%	123,72%
I.4	Indeks Pelaksanaan Pembangunan					94,77	94,3	95,4	94,6	94,8	95,15	93,36	99,1	99,56	100,90%	97,86%	104,76%	105,02%
I.5	Indeks Pelayanan publik					80,45	80,75	81,00	81,5	A-	80,69	81,4	84,24	A (4,53)	99,93%	100,49%	103,36%	100,67%
I.6	Nilai reformasi birokrasi Setda					_	_	64,27	A	A	_	A (84,70)	AA (92,22)	A (89,86)	_	131,79%	102,47%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
III	**INDIKATOR PROGRAM**																	
II.1	**BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL**																	
	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan					_	80,75	81	81,4	81,5	81,3	81,41	81,43	81,53	100,68%	100,51%	100,04%	100,04%
II.2	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**																	
	1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan					99,58%	98,30%	98,50%	98,52%	98,54%	99,28%	99,93%	99,35%	99,37%	101,00%	101,45%	100,84%	100,84%
	2. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis					_	_	_	_	89,00%	_	_	_	100,00%	_	_	_	112,36%
II.3	**BAGIAN HUKUM**																	
	1. Persentase harmonisasi produk hukum					100%	100%	100%	_	_	100%	100%	_	_	100,00%	100,00%	_	_
	2. Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan					_	_	_	99,1	99,2	_	_	99,4	100	_	_	100,28%	100,81%
II.4	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA**																	
	1. Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian					_	50%	55%	57%	_	50%	55%	57%	_	100,00%	100,00%	100,00%	_
	2. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian					_	_	_	_	89,00%	_	_	_	100,00%	_	_	_	112,36%
	3. Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik					_	74,64%	78,99%	80,77%	84,62%	78,99%	81,16%	92,31%	80,77%	105,83%	102,75%	114,29%	95,45%
	4. Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti					_	80,00%	86,66%	93,90%	94,58%	89,29%	99,49%	95,35%	98,72%	111,61%	114,80%	101,54%	104,38%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
II.5	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**																	
	1. Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori					90%	83%	85%	_	_	90%	90%	_	_	108,43%	105,88%	_	_
	2. Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi ketentuan dan standar ketepatan waktu					_	_	_	100,00%	100,00%	_	_	100,00%	100,00%	_	_	100,00%	100,00%
	3. Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah					Cepat berkembang (Nilai 379,27)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 386)	Cepat Berkembang (nilai 392)	Cepat Berkembang (Nilai 383,22)	Cepat berkembang (Nilai 388,33)	Cepat berkembang (Nilai 391,76)	Cepat berkembang (Nilai 393,91)	100%	100%	101,49%	100,48%
II.6	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
	1. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif					84,89%	84,89%	85,00%	_	_	86,39%	85,03%	_	_	101,77%	_	_	_
	2. Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat					2,15%	1,16%	1,14%	_	_	1,22%	1,31%	_	_	105,17%	115,31%	_	_
	3. Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat					_	_	_	46,67%	_	_	_	46,67%	_	_	_	100,00%	_
	4. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat					_	_	_	_	89,00%	_	_	_	100,00%	_	_	_	112,36%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
II.7	**BAGIAN ORGANISASI**																	
	1. Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan					_	_	_	25,00%	_	_	_	25,00%	_	_	_	100,00%	_
	2. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan					_	_	_	_	50,00%	_	_	_	56,10%	_	_	_	112,20%
	3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi					90,20%	95,00%	100,00%	_	_	95,12%	100,00%	_	_	100,13%	100,00%	_	_
	4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi					_	_	_	87,00%	_	_	_	93,66%	_	_	_	107,66%	_
	5. Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah					_	_	_	_	sangat tinggi	_	_	_	sangat tinggi 51)	_	_	_	100,00%
II.8	**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**																	
	Nilai SAKIP Setda					A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A	A	A (Nilai 87,86)	A (Nilai 88,8)	A (Nilai 87,81)	A (Nilai 84,47)	100%	100%	100%	100%
II.9	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**																	
	1. Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu					84,21%	85,00%	88,00%	_	_	78,46%	64,56%	_	_	92,31%	73,36%	_	_
	2. Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan					82,54%	85,00%	88,00%			96,07%	98,20%	_	_	113,02%	111,59%	_	_
	3. Persentase proses tender yang sesuai RUP					_	_	_	85,50%	_	_	_	98,53%	_	_	_	115,24%	_
	4. Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan					_	_	_	_	95,00%	_	_	_	100,00%	_	_	_	105,26%

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada periode tahun 2021–2024 dan realisasi tahun 2020, pembahasan selanjutnya difokuskan pada target dan realisasi tahun 2024 pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Analisis tahun terakhir ini memberikan gambaran aktual mengenai ketercapaian program serta menjadi acuan dalam peningkatan kinerja ke depan.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY. Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa skor EPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa skor EPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan skor antara Timda dan Timnas.

Realisasi indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2023.

Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2023 atas LPPD tahun 2022 yaitu 3,2920 dengan Status Kinerja Sedang. Sedangkan untuk evaluasi tahun 2024 atas LPPD tahun 2023 sampai dengan saat ini belum ada hasil penilaian dari Kemendagri.

Penetapan skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan tahapan antara lain:
   a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor;
   b. Penghitungan capaian kinerja makro;
   c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro;
   d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.
2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat.
   Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro.
3. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:
   Skor $4{,}21 \leq x \leq 5{,}00$ artinya status kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Skor $3{,}41 \leq x \leq 4{,}20$ artinya status kinerja Tinggi (T).
   Skor $2{,}61 \leq x \leq 3{,}40$ artinya status kinerja Sedang (S).

Skor 1,81 ≤ x ≤ 2,60 artinya status kinerja Rendah (R).

Skor 1,00 ≤ x ≤ 1,80 artinya status kinerja Sangat Rendah (SR).

Target Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 adalah sedang (skala 3,29-3,34). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 diperoleh status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sedang (3,29) sehingga capaian indikator ini sebesar:

= realisasi status kinerja PPD / target status kinerja PPD x 100%

= 3,29 / 3,29 x 100%

= 100,00%

Mulai tahun 2021 formula penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2022 masih menggunakan penilaian terakhir evaluasi tahun 2018 karena Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan keputusan tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional yang terbaru. Dengan ditetapkannya aturan tersebut maka hasil penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebelumnya tidak relevan lagi jika dibandingkan dengan hasil penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 dan 2024.

Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya komitmen yang baik dari perangkat daerah selaku penyedia data; dan
2) Adanya koordinasi dan konsolidasi data secara intensif antara tim penyusun LPPD dan tim reviu.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1) Masih adanya indikator yang belum bisa dipenuhi oleh perangkat daerah; dan
2) Adanya perbedaan penafsiran definisi operasional indikator LPPD.

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengintegrasikan Indikator LPPD ke dalam dokumen perencanaan daerah; dan
2) Melaksanakan workshop LPPD dengan melibatkan Kemendagri.

Dalam usahanya untuk mencapai target Bagian Tata Pemerintahan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perubahan regulasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga mengundang sebagai narasumber dalam bimtek dan workshop penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Bagian Tata Pemerintahan juga telah berkoordinasi dengan semua perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengumpulan data untuk penyusunan LPPD. Melaksanakan koordinasi dengan tim APIP terkait perubahan data dan format LPPD sebelum dilaksanakan reviu. Selain pelaksanaan reviu tim APIP juga dilibatkan untuk menentukan data mana yang disepakati bersama Tim Daerah dan perangkat daerah penyusun.

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jumlah pagu anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.240.885.290 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.151.669.454 atau 96,02%. Efisiensi anggaran sebesar Rp 89.215.836.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 atas LPPD tahun 2022 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Yogyakarta mendapatkan skor 3,29 dengan status kinerja Sedang. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 berdasarkan LPPD tahun 2021 sebesar 2,31 dengan status kinerja Rendah.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian adalah indeks perekonomian yang diperoleh dengan formula:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:
α : Kinerja Kebijakan perekonomian
β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

Realisasi tiga indikator program tahun 2024 adalah sebagai berikut: persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian adalah 100,00%, persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) adalah 80,77%, dan persentase dokumen perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 98,72%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai:

= (45% x 100%) + (35% x 80,77%) + (20% x 98,72%)

= 93,01

Pada tahun 2024 untuk indikator ini ditargetkan sebesar 75,34 sehingga tingkat capaian indikator indeks perekonomian sebesar:

= realisasi indeks perekonomian / target indeks perekonomian x 100%

= 93,01 / 75,34 x 100%

= 123,45%

Bagian Perekonomian dan Kerjasama sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai;
2) Melakukan desk pemetaan kerjasama daerah yang efektif dengan mitra kerjasama;
3) Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online;
4) Adanya sistem pengelolaan Pengetahuan;
5) Adanya forum komunikasi kerjasama;
6) Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan;
7) Dukungan pimpinan dalam berbagai aspek dimulai dari perencaanaan, pelaksanaa, evaluasi sampai dengan pelaporan;
8) Tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD;
9) Rapat Monev untuk BLUD dilakukan setiap bulan dan Monev BUMD 3 bulan sekali;
10) Koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai dan stakeholder dari BUMD dan BLUD;
11) Data yang dibutuhkan sudah tersedia;
12) Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal; dan
13) Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks perekonomian adalah sebagai berikut:

1) Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap;
2) Pihak Organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi pihak lain dalam kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta terkendala dalam menginplementasikan kerjasama;
3) Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul;
4) Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap dan tidak akurat;
5) Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online, sehingga menghambat penyampaian data/informasi; dan
6) Perubahan regulasi dan belum lengkap dari pusat yang memiliki implikasi terhadap tata kelola BUMD dan BLUD.

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengirimkan surat permintaan data dan membentuk media komunikasi yang efektif;
2) Menyusun rancangan sistem informasi dalam bentuk sistem pengelolaan pengetahuan;
3) Memberikan pelatihan teknis dalam proses fasilitasi penyusunan rencana kerja sama daerah;
4) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD;
5) Dilakukan pencermatan ulang pada usulan kerjasama;
6) Melengkapi dan penyempurnaan regulasi terkait tata kelola BUMD dan BLUD;
7) Mendorong keterlibatan pengawas internal dan eksternal dalam pengawasan BUMD dan BLUD; dan
8) Dilakukan penyusunan SOP untuk masing-masing unsur.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dengan indikator indeks perekonomian tahun 2024 tercapai melebihi target dengan capaian sebesar 123,45%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya mencapai target, Bagian Perekonomian dan Kerjasama telah melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pemetaan kerja sama. Kerja sama daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kerja sama antar pemerintah daerah di Indonesia, yang melibatkan perangkat daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), dan Dinas Perdagangan;
2. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat/lembaga vertikal, yang mencakup partisipasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; dan
3. Kerja sama dengan pihak ketiga, yang melibatkan perangkat daerah seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kerja sama dengan pemerintah daerah luar negeri. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki satu dokumen kerja sama aktif dengan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko, dalam bentuk Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada 20 Mei 2024; dan
2. Kerja sama dengan lembaga internasional, di mana Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi anggota organisasi internasional seperti ICLEI – Local Governments for Sustainability, League of Historical Cities (LHC), dan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Kegiatan kerja sama dengan ICLEI, misalnya, mencakup pengkajian potensi penurunan emisi karbon di Kota

Yogyakarta, yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan.

Kerja sama daerah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, melalui pertukaran pengalaman, sumber daya, dan teknologi antar pihak yang terlibat;
2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah, baik dalam hal kompetensi sumber daya manusia maupun akses terhadap pendanaan dan infrastruktur yang mendukung program pembangunan daerah;
3. Peningkatan daya saing daerah, dengan mendorong kolaborasi yang mempercepat inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal;
4. Peningkatan hubungan diplomatik dan jejaring internasional, yang membuka peluang baru bagi pengembangan sektor-sektor strategis di tingkat global; dan
5. Dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan, seperti pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan upaya penurunan emisi karbon.

Dalam rangka mencapai capaian kerja sama pada tahun 2024, sejumlah upaya telah dilakukan, di antaranya:

1. Optimalisasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, untuk memastikan sinergi antar perangkat daerah dan mitra kerja sama;
2. Koordinasi antar perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah bersama dengan mitra, untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja sama;
3. Monitoring dan evaluasi berkala, yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali pada bulan Juni dan Desember, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama yang telah berjalan;
4. Forum Kerja Sama Daerah, sebagai wadah diskusi, koordinasi, dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kerja sama;
5. Ekspose bahan kebijakan kerja sama daerah, untuk menyampaikan arah kebijakan dan prioritas kerja sama daerah kepada pihak-pihak terkait; dan
6. Desk pemetaan kerja sama daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama secara lebih terarah dan strategis.

Selain itu, pengetahuan terkait kerja sama daerah kini terpusat pada *Knowledge Management System* (KMS) Kerja Sama Daerah yang terintegrasi dalam super app Jogja Smart Service (JSS). Sistem ini menyediakan berbagai fitur, termasuk pengajuan kerja sama, basis data kerja sama, pengetahuan terkait kerja sama, hingga tanya jawab. Kehadiran KMS ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan kerja sama secara terintegrasi.

Inovasi ini telah direplikasi oleh beberapa pemerintah daerah lain, seperti Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Jember, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, yang mengadopsi konsep serupa untuk mendukung optimalisasi kerja sama daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat sebagian kecil kerja sama daerah yang belum ditindaklanjuti. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya perubahan personel di

struktur organisasi mitra. Hal ini menjadi perhatian dalam proses perencanaan kerja sama berikutnya.

Dalam rangka penyusunan kebijakan terkait pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif, Bagian Perekonomian dan Kerjasama menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan Inspektorat, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas PUPKP dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerjasama juga berkoordinasi dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain Biro Perekonomian dan SDA Pemda DIY, OJK, dan Bank Indonesia.

Dalam kaitannya melaksanakan pembinaan BUMD dan BLUD, Bagian Perekonomian dan Kerjasama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, BPKAD, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda.

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks perekonomian adalah karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Sementara Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian juga terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Pagu yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian sebesar Rp 1.982.265.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.969.340.101 atau 99,35%. Jika melihat realisasi sasaran yang tercapai 123,45% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 12.924.899 atau 0,65%.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan. Indikator ini merupakan gabungan indikator program persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (kinerja pengendalian pembangunan) dan indikator program Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan (kinerja layanan pengadaan), yang diperoleh dengan formula:

(30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan)

Indikator persentase Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan diperoleh dari Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar

pelayanan / total jumlah paket pengadaan sesuai Rencana Umum Pengadaan (tender, seleksi, dan tender cepat) x 100%. Jumlah paket sesuai standar pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 68 paket dari total 68 paket. Berdasarkan data tersebut capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilihat di aplikasi SIM Pelaporan. Per tanggal 5 Januari 2025 capaian indikator ini sebesar 99,37%. Berdasarkan data tersebut perhitungan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

(30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan)

= (100% x 30%) + (99,37% x 70%)

= 30 + 69,56

= 99,56

Target indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 94,8 sehingga tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

= realisasi IPP / target IPP x 100%

= 99,56 / 94,8 x 100%

= 105,02%

Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik;
3) Telah disahkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
4) Adanya monev realisasi fisik tiap bulan;
5) Ada *Early Warning Report* yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring;
6) Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD; dan
7) Adanya Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP;

2) Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia;
3) Ada OPD yang kurang berkomitmen dalam penginputan data SiRUP sehingga capaian RUP tidak sesuai target yang telah ditetapkan;
4) Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat dan yang tidak tepat membuat target fisik dalam penyusunan ROPK;
5) Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik;
6) Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan;
7) Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain;
8) Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru; dan
9) Kendala penggunaan aplikasi SIMPel terhadap hasil yang diharapkan.

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultansi terkait pengadaan barang/jasa;
2) Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan;
3) Melaksanakan pra monev kegiatan agar target fisik dapat tercapai;
4) Melakukan pendampingan ke OPD yang masih kurang dalam perencanaan pekerjaan;
5) Membuat panduan target fisik (ROPK dan KAK); dan
6) Proses pengembangan aplikasi SIMPel 2.0.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 tercapai dengan capaian sebesar 105,02%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian fisik bulanan dengan perangkat daerah yang realisasi fisiknya menyumbang deviasi yang tinggi untuk capaian fisik Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu Bagian Administrasi Pembangunan juga melaksanakan pengendalian fisik untuk perangkat daerah yang memiliki proyek kontrak kritis atau program prioritas. Proyek-proyek dalam pengendalian fisik di antaranya adalah Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II, Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Dinas Kesehatan, Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongkuning (Sisi Selatan), Pembangunan Gedung Puskesmas Pakualaman, Pembangunan Gedung Puskesmas Kraton, Pembangunan TPS3R Karangmiri,

Pembangunan SMP Negeri 10, Perluasan Gedung Fasilitas dan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Kota Yograkarta, Pembangunan SAH Kelurahan Giwangan RW 13 dan Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Terban RT.002 RW 001.

Dalam pelaksanaan pengendalian fisik Bagian Administrasi Pembangunan membentuk tim Pengendalian Pelaksanaan Pembanguan yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 193 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang didalamnya terdiri dari Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sementara itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Penginputan SIRUP bagi OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD dapat menyusun dan menginput RUP secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan seluruh proses perencanaan pengadaan dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk mengatasi kendala teknis yang dihadapi oleh OPD dalam proses penginputan RUP. Diharapkan setiap OPD dapat lebih siap dalam melaksanakan perencanaan pengadaan yang lebih baik, sehingga mendukung optimalisasi anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terkait fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yakni pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Workshop Pemenuhan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan narasumber dari LKPP. Selain itu juga dilaksanakan FGD terkait Permasalahan Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengundang Narasumber dari Kejaksanaan Negeri Kota Yogyakarta dan Ditreskrimsus Polda DIY. Dengan diadakannya workshop dan FGD tersebut diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat bekerja lebih efektif, mematuhi regulasi yang berlaku, serta meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat proses pengadaan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks pelaksanaan pembangunan adalah karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa juga terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan Barang dan Jasa. Pagu yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan sebesar Rp 1.090.274.820 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.071.767.242 atau 98,30%. Jika melihat realisasi sasaran yang tercapai 105,02% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 18.507.578 atau 1,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 99,67% maka ada peningkatan efisiensi anggaran sebesar 1,37%.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik adalah Indeks Pelayanan Publik. Indeks ini diperoleh dari hasil penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenpanRB dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Kebijakan pelayanan : bobot 24%
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) : bobot 25%
3. Sarna dan Prasarana : bobot 18%
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik : bobot 11%
5. Konsultasi dan pengaduan : bobot 10%
6. Inovasi : bobot 12%

Klasifikasi predikat Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. A (4,51-5,00) - Pelayanan prima
2. A- (4,01-4,50) - Sangat baik
3. B (3,51-4,00) - Baik
4. B- (3,01-3,50) - Baik (dengan catatan)
5. C (2,51-3,00) - Cukup
6. C- (2,01-2,50) - Cukup (dengan catatan)
7. D (1,51-2,00) - Prioritas pembinaan
8. E (1,01-1,50) - Prioritas pembinaan
9. F (0,00-1,00) - Prioritas pembinaan

Formula Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari hasil penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Target indikator ini pada tahun 2024 adalah A- (4,01 - 4,50) tercapai A (4,53). Capaian indeks tersebut menunjukan kinerja pelayanan masuk kategori Pelayanan Prima. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

= realisasi Indeks Pelayanan Publik / target Indeks Pelayanan Publik x 100%
= 4,53 / 4,5 x 100%
= 100,67%

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021-2023 berdasarkan pelaksanaan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Perangkat Daerah/ Unit Kerja baik eksternal maupun internal yang dilakukan setahun sekali sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017.

Namun untuk survei kepuasan masyarakat di Puskesmas dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.

Mulai tahun 2024 berdasarkan hasil review Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ada perbaikan formula indikator dari hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal menjadi Hasil Nilai Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sehingga target indikator ini pada tahun 2024 mengalami perubahan.

Bagian Organisasi dan Bagian Umum dan Protokol sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik;
2) Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
3) Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks pelayanan publik adalah pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik masih bersifat administratif.

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah koordinasi intensif untuk perbaikan pelayanan.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran capaian indikator indeks pelayanan publik tahun 2024 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,67%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran, Bagian Organisasi telah melaksanakan pembinaan pelayanan publik kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja. Bagian Organisasi juga berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait dengan kebijakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan publik juga melibatkan Tim Pembina Pelayanan Publik.

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks pelayanan publik adalah kegiatan yang berfokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 5 Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran indeks pelayanan publik, yaitu: Kegiatan Penataan Organisasi, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kegiatan Penataan Organisasi terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dan Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan masing-masing terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta dan Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta. Sementara Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pagu yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik sebesar Rp 8.572.615.640 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.268.768.206 atau 96,46%. Jika melihat realisasi sasaran yang tercapai 100,67% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 303.847.434 atau 3,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 97,55% maka ada peningkatan efisiensi realisasi anggaran sebesar 1,09%.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Indikator ini baru ditetapkan mulai tahun 2023 dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 menggantikan indikator sebelumnya yaitu indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.

Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula: jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dibagi jumlah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dikali 100%. Dari total 35 kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat terimplementasi 14 kebijakan. Kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu:

1) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
2) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
3) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
4) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Program Kampung Kembar;
5) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

6) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis Tahun 2023-2026 (25 Januari 2023);
7) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 Ketahanan Keluarga
8) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (19 Mei 2023);
9) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta;
11) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
12) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perpustakaan;
13) Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta; dan
14) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 42,86% sementara realisasinya tercapai sebesar 40%. Tingkat capaian indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sebesar:

= realisasi implementasi kebijakan / target implementasi kebijakan x 100%
= 40 / 42,86 x 100%
= 93,33%

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada tahun 2024 tercapai sebesar 93,33%. Hal ini disebabkan karena terdapat kebijakan yang belum tercapai dalam pengukuran implementasi kebijakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja tersebut yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target sasaran kinerja dalam pengukuran implementasi kebijakan tahun 2024 yakni:

1) Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra;
2) Update database kebijakan yang kurang optimal; dan
3) Kurang terinfonya OPD mitra tentang ketugasan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu :

1) Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan mitra OPD terkait; dan
2) Optimalisasi upaya penyamaan persepsi untuk target pencapaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam peningkatan kualitas kebijakan.

Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Pagu yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sebesar Rp 3.636.869.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.623.060.218 atau 99,62%.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Sasaran strategis meningkatnya reformasi birokrasi merupakan sasaran baru dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) tahun 2023-2026. Formula indikator sasaran ini adalah hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dengan 8 parameter. Nilai hasil evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Hasil Evaluasi	Hasil Pembobotan
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30%	84,47	25,34
2	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	15%	94,78	14,22
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	15%	85,73	12,86
4	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15%	100,00	15,00
5	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2%	1,69	0,68
6	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	5%	86,28	4,31
7	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3%	81,74	2,45
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15%	5,00	15,00
TOTAL				**89,86**

Nilai hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi Sekretariat Daerah pada tabel di atas berdasarkan dari laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat Nomor: X.700.1.2.4/24/E.RB/A/XI/2024 tgl 28 November 2024.

Indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan predikat A. Target tersebut berhasil dicapai dengan hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter sebesar 89,86 atau mendapatkan predikat A dengan interprestasi

sangat baik. Tingkat capaian indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat sebesar 100% karena capaian sesuai dengan target.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 formula indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat mengalami perubahan sehingga pada tahun 2024 realisasinya turun karena berbeda cara penghitungannya.

Bagian Administrasi dan Keuangan sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah adanya komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik.

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan; dan
2. Nilai evaluasi kearsipan tidak maksimal karena ada Bagian yang baru dibentuk tahun 2021.

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut agar dapat memperbaiki capaian target; dan
2. Berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyosialisasikan tentang kearsipan.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2024 tercapai sebesar 100%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat adalah adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan kegiatan pendukung lainnya. Pagu total yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp 33.577.188.196 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.141.092.286 atau 92,74%. Jika melihat realisasi sasaran yang tercapai 100% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 2.436.095.910 atau 7,26%.

7. Realisasi Program Sekretariat Daerah

Capaian program Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat	89,00%	100%	112,36%
		Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi standar ketentuan dan ketepatan waktu	100%	100%	100%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	392 (cepat berkembang)	393,91 (cepat berkembang)	100,48%
		Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,2	100	100,81%
		Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	94,58%	98,72%	104,38%
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian	89%	100%	112,36%
		Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	84,62%	80,77%	95,45%
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54%	99,37%	100,84%
		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	89%	100%	112,35%
		Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standart pelayanan	95%	100%	105,26%
3.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	50%	56,10%	112,20%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	Sangat Tinggi (46,1-55)	Sangat tinggi (51)	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,50	81,53	100,04%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A (84,47)	100%

Indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis kesejahteraan rakyat terealisasi sebesar 100% dari target 89% atau tercapai 112,36% dari target. Ada 2 permasalahan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan, yaitu : Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting 2025 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terkait Posyandu dan pedagang kaki lima (PKL).

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis kesejahteraan rakyat yaitu komitmen bersama dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan dengan penyamaan review perbaikan kinerja.

Indikator persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi standar ketentuan dan ketepatan waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau tercapai 100% dari target. Realisasi berdasarkan data 5 dokumen yang telah dikirim tepat waktu. Kelima dokumen tersebut adalah:

1) LPPD dikirim tanggal 24 Maret 2024 deadline tanggal 31 Maret 2024;
2) SPM dikirim tanggal 15 Maret 2024 deadline tanggal 31 Maret 2024;
3) LKPJ dikirim tanggal 15 Februari 2024 deadline tanggal 31 Maret 2024;
4) Nota pengantar LKPJ dikirim tanggal 15 Maret 2024 deadline tanggal 31 Maret 2024;
5) Laporan administrasi pemerintahan dikirim tanggal 24 Desember 2024 deadline tanggal 31 Desember 2024.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi standar ketentuan dan ketepatan waktu yaitu:

1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu; dan
2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan.

Indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah terealisasi dengan nilai 393,91 (cepat berkembang) dari target 392 (cepat berkembang) atau tercapai 100,48% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari total nilai evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 17.726 dibagi 45 kelurahan. Indikator ini untuk mengukur tingkat perkembangan kelurahan berdasarkan evaluasi dari kegiatan di Kelurahan Tahun 2023 yang mencakup

bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Adapun hasil evaluasi tersebut dilaporkan oleh kelurahan melalui aplikasi epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id pada bulan Januari 2024. Dari 45 Kelurahan semuanya sudah masuk kategori cepat berkembang.

Faktor pendorong tercapainya indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah yaitu sudah tersedianya aplikasi dari Kemendagri untuk penyelenggaraan evaluasi perkembangan pembangunan di kelurahan.

Indikator indeks penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum terealisasi sebesar 100 dari target 99,2 atau tercapai 100,81% dari target. Untuk kegiatan Perundang-undangan target pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum dokumen produk hukum sebanyak 685 dokumen produk hukum telah terelisasi 100%. Dalam kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan HAM perkara yang terselesaikan sebanyak 13 perkara dari 13 perkara yang masuk atau 100% tercapai. Nilai Kota Peduli HAM mendapat nilai 100.

Faktor pendorong tercapainya indikator indeks penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum yaitu :

1) Tim kerja yang solid (kompak, *capable*, semangat dan berdedikasi) dan lingkungan kerja yang nyaman;
2) Koordinarsi internal dan eksternal yang lancar;
3) Adminstrasi yang tertib;
4) PPTK aktif monitoring tatakala kegiatan; dan
5) Sarana dan Prasarana yang mendukung.

Indikator persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 98,72% dari target 94,58% atau tercapai 104,38% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah dokumen perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 308 kerjasama dibagi total kerjasama yang masih berlaku sebanyak 312.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti yaitu :

1) Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai;
2) Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online;
3) Adanya sistem pengelolaan Pengetahuan;
4) Adanya forum komunikasi kerjasama;
5) Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan; dan
6) Dukungan pimpinan dalam berbagai aspek dimulai dari perencaanaan, pelaksanaa, evaluasi sampai dengan pelaporan.

Indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian terealisasi sebesar 100% dari target 89% atau tercapai 112,36% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti sebanyak 5 dibagi total permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebanyak 5. Permasalahan strategis yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1) Membentuk Tim Percepatan Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 314 tahun 2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta;
2) Melakukan Kajian Rancangan Sistem dan Basis Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi Kota Yogyakarta;
3) Kompetensi ASN:
   a) Pelatihan teknis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah dilaksanakan dalam proses fasilitasi penyusunan rencana kerja sama daerah.
   b) Media digital TEMAN PERKASA menyediakan pengetahuan kerja sama daerah dan pengetahuan umum terkait yang dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun.
   c) ASN dilibatkan secara rutin dalam forum kerja sama daerah dan ekspose kerja sama daerah untuk menambah pengetahuan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama daerah.
4) Tanggung Jawab Petugas Penghubung:
   a) Koordinasi sebelum pelaksanaan evaluasi untuk memastikan petugas penghubung kerja sama daerah (PPKSD) memiliki pengetahuan mengenai kerja sama daerah yang dilaksanakan.
   b) Setiap PPKSD harus dibekali surat perintah dari atasan masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPKSD.
5) Melengkapi regulasi fleksibilitas dan tata kelola BLUD serta penyempurnaan sistem penilaian kinerja dan monev.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian yaitu :

1) Data yang dibutuhkan sudah tersedia;
2) Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal; dan
3) Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Indikator persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) terealisasi sebesar 80,77% dari target 84,62% atau tercapai 95,45%. Jumlah BUMD masuk kategori berkinerja baik sebanyak 2 BUMD dari total 3 BUMD. BUMD yang belum masuk kategori baik adalah Perseroda Jogjatama Vishesha karena dari hasil penilaian kinerja laporan laba rugi belum memperoleh profit. Jumlah BLUD masuk kategori berkinerja baik sebanyak 19 BLUD dari total 23 BLUD. BLUD yang masuk dalam kategori “TIDAK SEHAT” pada TW III Tahun 2024, yaitu:

1) Puskesmas Tegalrejo

   Total Score Puskesmas Tegalrejo turun 17 point dari 71 pada triwulan II menjadi 54 pada triwulan III. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada penilaian aspek keuangan yaitu dari 43 pada triwulan II menjadi 21 pada triwulan III. Dari 8 (delapan) indikator aspek keuangan yang dinilai jika dibandingkan dengan triwulan II terjadi penurunan pada 5 (lima) indikator

yaitu: rasio kas, rasio lancar, dan rasio profitabilitas yang meliputi ROFA, ROTA, dan ROE.

2) Puskesmas Umbulharjo II

Total score Puskesmas Umbulharjo II pada triwulan III mengalami penurunan 0,75 point yaitu dari 51,5 menjadi 50,75 hal ini disebabkan penurunan hasil penilaian aspek keuangan. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 8 (delapan) rasio keuangan yang dinilai terdapat 3 (tiga) rasio yang mengalami penurunan score dengan penurunan terbesar sebesar 2 point pada rasio kas, sedangkan penurunan lain yang terjadi pada rasio profitabilitas yaitu imbalan atas total aset (ROTA) turun 0,25 dan imbalan atas ekuitas (ROE) turun 0.5 point. Dari 8 (delapan) rasio keuangan yang dinilai score maksimal hanya dicapai 2 (dua) rasio yaitu periode penagihan piutang dan perputaran aset tetap, sedangkan score rendah terdapat pada 5 (lima) rasio yaitu rasio lancar, rasio profitabilitas (ROTA, ROFA, ROE) dan rasio kemandirian.

3) Puskesmas Kraton

Total score Puskesmas Kraton pada triwulan III mengalami penurunan 1 poin yaitu dari 50,50 pada triwulan II menjadi 49,50 pada triwulan III, hal ini disebabkan penurunan hasil penilaian aspek keuangan. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 8 (delapan) rasio keuangan yang dinilai terdapat 3 (tiga) rasio yang mengalami penurunan score dengan penurunan terbesar pada rasio kas turun sebesar 2 poin. Terdapat 1 (satu) rasio yang mengalami kenaikan yaitu perputaran aset tetap dan 6 (enam) rasio tetap yaitu rasio lancar, periode penagihan piutang, rasio profitabilitas baik ROTA, ROFA maupun ROE, dan rasio kemandirian. Dari 8 (delapan) rasio keuangan yang dinilai hanya terdapat 2 (dua) yang mendapatkan score maksimal yaitu periode penagihan piutang dan perputaran aset, sedangkan rasio profitabilitas baik ROTA, ROFA maupun ROE mendapatkan score paling rendah.

4) UPT Logam

Penilaian kinerja keuangan UPT Logam triwulan III menunjukkan adanya kenaikan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari total score 44,05 pada triwulan II menjadi 45,75 pada triwulan III atau naik 1 poin, sedangkan kategori dan predikat kinerja pada triwulan II maupun triwulan III tetap pada kriteria penilaian B atau kategori sedang dengan predikat ”Tidak Sehat”.

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan indikator persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) yaitu :

1) Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap dan tidak akurat; dan
2) Perubahan regulasi dan belum lengkap dari pusat yang memiliki implikasi terhadap tata kelola BUMD dan BLUD.

Adapun rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan di atas yaitu :

1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD;
2) Melengkapi dan penyempurnaan regulasi terkait tata kelola BUMD dan BLUD; dan

3) Mendorong keterlibatan pengawas internal dan eksternal dalam pengawasan BUMD dan BLUD.

Indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan per tanggal 5 Januari 2025 terealisasi sebesar 99,37% dari target 98,54% atau tercapai 100,84% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi output kegiatan semua OPD/Unit Kerja dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai anggaran. Deviasi output kegiatan sebesar 0,65% (dari total 100% jika semua kegiatan terlaksana) disebabkan oleh:

1) Belanja Sesuai Kebutuhan
   a. Belanja bahan bakar gas dan pelumas dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam kegiatan penanganan sampah, yang meliputi pemilahan dan pengolahan sampah di berbagai fasilitas seperti instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah, dan fasilitas terkait lainnya. Semua kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini penting karena hasil RDF (*Refuse-Derived Fuel*) saat ini belum memenuhi syarat untuk dikirimkan kepada mitra yang berwenang.
   b. Biaya retribusi pengolahan sampah juga akan digunakan untuk penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, sesuai dengan kebutuhan.
2) Masa Transisi dan Tahun Politik 2024
   a. Rencana awal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu 10 Raperda akan tetapi karena tahun 2024 merupakan tahun Pemilihan Umum maka Jadwal Anggota Dewan menjadi padat, sehingga terdapat beberapa pembahasan raperda yang mengalami hambatan oleh Sekretariat DPRD.
   b. Alat Kelengkapan DPRD baru terbentuk pada bulan November karena Pemilihan Umum tahun 2024 sehingga menghambat banyak kegiatan Sekretariat DPRD.
3) Faktor Pihak Ketiga
   a. Pembelian cadangan beras pemerintah daerah oleh Dinas Pertanian dan Pangan tidak terlaksana karena ketidaksiapan PT. Taru Martani dalam pengelolaan beras, harga beras medium di atas HET, belum ada Peraturan Gubernur terbaru tentang jumlah cadangan beras pemerintah daerah sesuai perhitungan terbaru.
4) Faktor Kerjasama Daerah
   a. Rincian Pembayaran penanggulangan masalah persampahan tidak terealisasi dalam sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak mau menerima kompensasi penanganan sampah di TPA Sitimulyo dengan alasan waktu yang tidak mencukupi.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yaitu :

1) Adanya monev realisasi fisik tiap bulan;
2) Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring; dan
3) Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik.

Indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan terealisasi sebesar 100% dari target 89% atau tercapai 112,35% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 5 dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebanyak 5. Permasalahan strategis yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan pengendalian Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP) melalui monitoring dan evaluasi (Notulen Monev Data JLOP);
2. Penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 81 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan APBD;
3. Kajian Analisa Harga Satuan jasa lainnya (pertamanan dan keamanan);
4. Penguatan pengendalian kontrak fisik melalui pengembangan aplikasi SIMPel v2; dan
5. Pengendalian pekerjaan yang lebih intensif untuk pekerjaan konstruksi yang harga penawarannya di bawah 80% dilaksanakan secara rutin dengan pengendalian fisik ke lapangan dan rapat koordinasi.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan yaitu koordinasi yang intensif dengan OPD leading sector (Bappeda, Bagian Organisasi, Dinas PU, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, dan Dinas Lingkungan Hidup).

Indikator persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standart pelayanan terealisasi sebesar 100% per tanggal 31 Desember 2024 dari target 95% atau tercapai 105,26% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah paket sesuai standar pelayanan sebanyak 68 paket dibagi total paket sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 68 paket.

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar pelayanan yaitu :

1) Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik;
3) Telah disahkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

4) Pendampingan dan koordinasi terkait permasalahan pengadaan barang/jasa selalu dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Indikator persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi keistimewaan terealisasi sebesar 56,10% dari target 50% atau tercapai 112,20% dari target. Indikator ini didapatkan dari jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi keistimewaan dibagi jumlah total perangkat daerah dikali 100%. Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi keistimewaan ini adalah perangkat daerah yang telah melakukan *self assesment* melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengampu keistimewaan. Tahun 2024 ini, terdapat 23 perangkat daerah yang telah melakukan *self assesment* melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan OPD di Provinsi DIY terkait pengampu keistimewaan, antara lain:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
14. Kemantren Tegalrejo;
15. Kemantren Pakualaman;
16. Kemantren Jetis;
17. Kemantren Danurejan;
18. Kemantren Kotagede;
19. Kemantren Gondokusuman;
20. Kemantren Kraton;
21. Kemantren Gondomanan;
22. Kemantren Wirobrajan; dan
23. Kemantren Umbulharjo.

Indikator tingkat kematangan organisasi perangkat daerah terealisasi dengan predikat sangat tinggi yaitu nilai 51 dari target predikat sangat tinggi dengan rentang nilai 46,1 - 55 atau tercapai 100% dari target. Tahun 2024 ini, telah diperoleh nilai kematangan organisasi sebesar 2091, dengan jumlah total Perangkat daerah sebanyak 41 perangkat

daerah. Sehingga, nilai kematangan Organisasi yang diperoleh adalah 51 (lima puluh satu), dengan predikat Sangat Tinggi. Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah didapatkan dari parameter sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah;
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah;
7. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur;
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;
9. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur;
10. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah; dan
11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan parameter di atas, akan diperoleh nilai dengan rentang predikat sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (46,1 - 55).
2. Tinggi (37,1 - 46).
3. Sedang (28,1 - 37).
4. Rendah (19,1 - 28).
5. Sangat Rendah (10 - 19).

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi keistimewaan dan indikator tingkat kematangan organisasi perangkat daerah tersebut yaitu:

1) Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan;
2) Tersedianya SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis;
3) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait berjalan dengan baik;
4) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah berjalan dengan baik; dan
5) Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan penugasan urusan keistimewaan.

Indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum dan keprotokolan terealisasi sebesar 81,53 (masuk kategori: baik) dari target 81,50 atau tercapai 100,04% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 9 unsur pelayanan oleh 105 responden dengan menggunakan skala likert. Target responden adalah tamu dan masyarakat yang memanfaatkan layanan Bagian Umum Protokol (eksternal). Periode survey dilakukan di bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Sembilan unsur pelayanan dan hasil nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan, memperoleh nilai: 3,286.
2) Sistem mekanisme dan prosedur, memperoleh nilai: 3,390.

3) Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan, memperoleh nilai: 3,210.
4) Biaya/Tarif, memperoleh nilai: 3,505.
5) Produk spesifikasi hasil pelayanan, memperoleh nilai: 3,276.
6) Kompetensi pelaksana, memperoleh nilai: 3,190.
7) Perilaku pelaksana, memperoleh nilai: 3,438.
8) Penanganan aduan, saran dan masukan, memperoleh nilai: 3,476.
9) Ketersediaan sarana dan prasarana, memperoleh nilai: 2,876.

Faktor pendorong tercapainya indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum dan keprotokolan yaitu :

1) Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan;
2) Adanya koordinasi internal Bagian Umpro secara rutin; dan
3) Adanya inovasi dan aplikasi yang memudahkan Bagian Umpro pada layanan umum dan keprotokolan.

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat terealisasi dengan nilai A (84,47) dari target nilai A atau tercapai 100% dari target. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Masing-masing komponen memperoleh poin sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja memperoleh poin 29,53;
2) Pengukuran kinerja memperoleh poin 26,84;
3) Pelaporan kinerja memperoleh poin 13,66; dan
4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh poin 14,44.

Faktor pendorong tercapainya indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat yaitu komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik.

Capaian anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta periode Renstra Sekretariat Daerah 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																	
ProgramPeningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	**695.351.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**687.935.086**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,93%**	**-**	**-**	**-**	**-**		
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	314.652.600	-	-	-	-	314.412.123	-	-	-	-	99,92%	-	-	-	-		
Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	260.336.400	-	-	-	-	253.250.463	-	-	-	-	97,28%	-	-	-	-		
Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	120.362.400	-	-	-	-	120.272.500	-	-	-	-	99,93%	-	-	-	-		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**-**	**1.704.632.411**	**1.228.031.847**	**1.525.084.572**	**2.240.885.290**	**-**	**1.609.627.889**	**1.125.472.732**	**1.321.586.272**	**2.151.669.454**	**-**	**94,43%**	**91,65%**	**86,66%**	**96,02%**		
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**-**	**1.704.632.411**	**1.228.031.847**	**1.525.084.572**	**2.240.885.290**	**-**	**1.609.627.889**	**1.125.472.732**	**1.321.586.272**	**2.151.669.454**	**-**	**94,43%**	**91,65%**	**86,66%**	**96,02%**		
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		256.929.736	234.357.692	393.718.000	450.043.612		251.493.947	234.225.840	291.328.000	444.073.000	-	97,88%	99,94%	73,99%	98,67%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1.311.940.555	705.401.676	948.554.300	1.466.399.500		1.229.211.208	639.358.915	860.285.670	1.388.754.924	-	93,69%	90,64%	90,69%	94,71%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		135.762.120	288.272.479	182.812.272	324.442.178		128.922.734	251.887.976	169.972.602	318.841.530	-	94,96%	87,38%	92,98%	98,27%		
II BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**-**	**2.708.135.245**	**2.708.990.040**	**3.851.265.000**	**3.636.869.000**	**-**	**2.390.384.407**	**2.666.597.517**	**3.782.906.396**	**3.623.060.218**	**-**	**88,27%**	**98,44%**	**98,23%**	**99,62%**		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**-**	**2.708.135.245**	**2.708.990.040**	**3.851.265.000**	**3.636.869.000**	**-**	**2.390.384.407**	**2.666.597.517**	**3.782.906.396**	**3.623.060.218**	**-**	**88,27%**	**98,44%**	**98,23%**	**99,62%**		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1.920.421.080	2.028.280.840	3.064.308.000	3.114.578.000		1.668.129.810	1.994.364.118	3.001.595.000	3.111.010.000	-	86,86%	98,33%	97,95%	99,89%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		294.681.080	293.951.160	200.896.000	220.480.000		281.423.177	289.489.459	199.357.500	213.470.500	-	95,50%	98,48%	99,23%	96,82%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		493.033.085	386.758.040	586.061.000	301.811.000		440.831.420	382.743.940	581.953.896	298.579.718	-	89,41%	98,96%	99,30%	98,93%		

URAIAN		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
III	**BAGIAN HUKUM**																	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum		**1.114.004.780**	-	-	-	-	**1.109.716.272**	-	-	-	-	**99,62%**	-	-	-	-		
	Kegiatan Peraturan Perundang-undangan	633.124.100	-	-	-	-	630.624.100	-	-	-	-	99,61%	-	-	-	-		
	Kegiatan Bantuan Hukum	390.949.300	-	-	-	-	390.263.200	-	-	-	-	99,82%	-	-	-	-		
	Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	89.931.380	-	-	-	-	88.828.972	-	-	-	-	98,77%	-	-	-	-		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		-	**1.585.698.168**	**1.630.900.328**	**1.637.857.224**	**1.573.609.224**	-	**1.410.888.118**	**1.458.800.408**	**1.588.243.597**	**1.491.055.632**	-	**88,98%**	**89,45%**	**96,97%**	**94,75%**		
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	**1.585.698.168**	**1.630.900.328**	**1.637.857.224**	**1.573.609.224**	-	**1.410.888.118**	**1.458.800.408**	**1.588.243.597**	**1.491.055.632**	-	**88,98%**	**89,45%**	**96,97%**	**94,75%**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	963.688.248	851.438.248	712.598.000	701.958.400	-	953.621.231	841.384.909	708.435.750	701.884.135	-	98,96%	98,82%	99,42%	99,99%		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	336.272.800	415.384.000	310.422.000	288.390.000	-	179.716.327	258.996.579	280.128.097	215.270.997	-	53,44%	62,35%	90,24%	74,65%		
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	285.737.120	364.078.080	614.837.224	583.260.824	-	277.550.560	358.418.920	599.679.750	573.900.500	-	97,13%	98,45%	97,53%	98,40%		
IV	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA**																	
Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama		**532.494.740**	-	-	-	-	**528.746.880**	-	-	-	-	**99,30%**	-	-	-	-		
	Kegiatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	122.794.740	-	-	-	-	122.396.380	-	-	-	-	99,68%	-	-	-	-		
	Kegiatan Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	26.015.000	-	-	-	-	25.795.000	-	-	-	-	99,15%	-	-	-	-		
	Kegiatan Kerjasama Daerah	383.685.000	-	-	-	-	380.555.500	-	-	-	-	99,18%	-	-	-	-		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		-	**508.550.248**	**596.730.560**	**893.866.000**	**990.644.000**	-	**436.158.020**	**579.180.788**	**887.880.019**	**986.028.116**	-	**85,76%**	**97,06%**	**99,33%**	**99,53%**		
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	-	**508.550.248**	**596.730.560**	**893.866.000**	**990.644.000**	-	**436.158.020**	**579.180.788**	**887.880.019**	**986.028.116**	-	**85,76%**	**97,06%**	**99,33%**	**99,53%**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		284.982.248	376.830.560	600.757.000	591.929.000		220.986.350	361.683.780	596.361.593	588.549.103	-	77,54%	95,98%	99,27%	99,43%		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		110.568.000	60.000.000	59.755.000	160.955.000		102.231.670	58.313.208	58.246.476	160.662.638	-	92,46%	97,19%	97,48%	99,82%		
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		113.000.000	159.900.000	233.354.000	237.760.000		112.940.000	159.183.800	233.271.950	236.816.375	-	99,95%	99,55%	99,96%	99,60%		
Program Perekonomian dan Pembangunan		-	**526.153.504**	**670.953.984**	**934.932.000**	**991.621.000**	-	**425.968.838**	**664.820.817**	**817.917.008**	**983.311.985**	-	**80,96%**	**99,09%**	**87,48%**	**99,16%**		
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	**526.153.504**	**670.953.984**	**934.932.000**	**991.621.000**	-	**425.968.838**	**664.820.817**	**817.917.008**	**983.311.985**	-	**80,96%**	**99,09%**	**87,48%**	**99,16%**		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		219.850.424	149.358.000	396.764.000	465.511.000		128.812.278	149.314.500	394.402.765	462.185.780	-	58,59%	99,97%	99,40%	99,29%		
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		149.543.080	403.895.984	399.791.000	349.160.000		141.674.060	399.687.192	285.226.243	344.377.055	-	94,74%	98,96%	71,34%	98,63%		
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		156.760.000	117.700.000	138.377.000	176.950.000		155.482.500	115.819.125	138.288.000	176.749.150	-	99,19%	98,40%	99,94%	99,89%		

URAIAN		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
V	**BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**																	
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembanguan		**251.932.104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**251.791.078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,94%**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	38.737.040	-	-	-	-	38.722.780	-	-	-	-	99,96%	-	-	-	-		
	Kegiatan Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	117.691.120	-	-	-	-	117.625.340	-	-	-	-	99,94%	-	-	-	-		
	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	95.503.944	-	-	-	-	95.442.958	-	-	-	-	99,94%	-	-	-	-		
Program Perekonomian dan Pembangunan		**-**	**578.286.294**	**543.249.760**	**516.637.930**	**544.342.000**	**-**	**557.138.712**	**534.799.150**	**486.614.100**	**529.407.400**	-	**96,34%**	**98,44%**	**94,19%**	**97,26%**		
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**-**	**578.286.294**	**543.249.760**	**516.637.930**	**544.342.000**	**-**	**557.138.712**	**534.799.150**	**486.614.100**	**529.407.400**	-	**96,34%**	**98,44%**	**94,19%**	**97,26%**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	307.520.184	266.220.600	170.421.680	97.493.000	-	302.700.654	261.006.830	144.617.100	96.951.000	-	98,43%	98,04%	84,86%	99,44%		
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	139.277.030	132.369.080	208.101.250	254.691.400	-	129.213.504	129.571.080	208.091.000	240.548.900	-	92,77%	97,89%	100,00%	94,45%		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	131.489.080	144.660.080	138.115.000	192.157.600	-	125.224.554	144.221.240	133.906.000	191.907.500	-	95,24%	99,70%	96,95%	99,87%		
VI	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**																	
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		**235.359.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**232.072.415**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,60%**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa	62.383.000	-	-	-	-	61.316.468	-	-	-	-	98,29%	-	-	-	-		
	Kegiatan Operasional Pengadaan Barang/ Jasa	70.957.400	-	-	-	-	70.874.914	-	-	-	-	99,88%	-	-	-	-		
	Kegiatan Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa	102.019.000	-	-	-	-	99.881.033	-	-	-	-	97,90%	-	-	-	-		
Program Perekonomian dan Pembangunan		**-**	**545.914.736**	**549.927.974**	**594.668.320**	**545.932.820**	**-**	**539.660.419**	**543.064.891**	**562.117.380**	**542.359.842**	-	**98,85%**	**98,75%**	**94,53%**	**99,35%**		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**-**	**545.914.736**	**549.927.974**	**594.668.320**	**545.932.820**	**-**	**539.660.419**	**543.064.891**	**562.117.380**	**542.359.842**	-	**98,85%**	**98,75%**	**94,53%**	**99,35%**		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	213.774.004	159.175.564	197.459.000	207.237.000	-	212.755.081	158.991.552	197.216.394	207.125.116	-	99,52%	99,88%	99,88%	99,95%		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	183.457.972	213.343.946	225.610.000	129.075.000	-	178.738.794	207.858.771	194.862.886	128.693.426	-	97,43%	97,43%	86,37%	99,70%		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	148.682.760	177.408.464	171.599.320	209.620.820	-	148.166.544	176.214.569	170.038.100	206.541.300	-	99,65%	99,33%	99,09%	98,53%		

URAIAN		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
VII	**BAGIAN ORGANISASI**																	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		**428.146.960**	-	-	-	-	**419.711.920**	-	-	-	-	**98,03%**	-	-	-	-		
	Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	115.233.040	-	-	-	-	115.034.780	-	-	-	-	99,83%	-	-	-	-		
	Kegiatan Pemantapan Pelayanan Publik	145.481.080	-	-	-	-	140.273.560	-	-	-	-	96,42%	-	-	-	-		
	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	167.432.840	-	-	-	-	164.403.580	-	-	-	-	98,19%	-	-	-	-		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**174.296.500**	**51.613.900**	**124.064.000**	**510.000.000**	**70.416.000**	**157.614.750**	**48.503.050**	**107.192.689**	**453.745.970**	**70.416.000**	**90,43%**	**93,97%**	**86,40%**	**88,97%**	**100,00%**		
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**124.064.500**	**28.701.900**	**63.361.000**	**255.500.000**	**45.279.000**	**112.810.750**	**25.591.900**	**50.800.160**	**203.252.790**	**45.279.000**	**90,93%**	**89,16%**	**80,18%**	**79,55%**	**100,00%**		
	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	124.064.500	28.701.900	63.361.000	255.500.000	45.279.000	112.810.750	25.591.900	50.800.160	203.252.790	45.279.000	90,93%	89,16%	80,18%	79,55%	100,00%		
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	**50.232.000**	**22.912.000**	**60.703.000**	**254.500.000**	**25.137.000**	**44.804.000**	**22.911.150**	**56.392.529**	**250.493.180**	**25.137.000**	**89,19%**	**100,00%**	**92,90%**	**98,43%**	**100,00%**		
	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	50.232.000	22.912.000	60.703.000	254.500.000	25.137.000	44.804.000	22.911.150	56.392.529	250.493.180	25.137.000	89,19%	100,00%	92,90%	98,43%	100,00%		
Program penunjang urusan pemerintahan daerah		**-**	**659.507.760**	**525.294.016**	**557.384.610**	**538.424.132**	**-**	**629.286.422**	**515.002.756**	**544.351.750**	**534.688.750**	-	**95,42%**	**98,04%**	**97,66%**	**99,31%**		
	Kegiatan Penataan Organisasi	**-**	**659.507.760**	**525.294.016**	**557.384.610**	**538.424.132**	**-**	**629.286.422**	**515.002.756**	**544.351.750**	**534.688.750**	-	**95,42%**	**98,04%**	**97,66%**	**99,31%**		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	257.072.840	221.516.288	215.225.000	168.741.000	-	245.842.982	221.069.428	209.417.000	168.230.000	-	95,63%	99,80%	97,30%	99,70%		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	237.596.840	159.276.288	179.190.000	160.276.000	-	237.428.040	158.347.288	178.386.500	159.979.000	-	99,93%	99,42%	99,55%	99,81%		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	164.838.080	118.273.040	119.232.000	175.002.000	-	146.015.400	110.795.040	114.276.500	172.799.000	-	88,58%	93,68%	95,84%	98,74%		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	26.228.400	43.737.610	34.405.132	-	-	24.791.000	42.271.750	33.680.750	-	#DIV/0!	94,52%	96,65%	97,89%		

URAIAN		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
VIII	**BAGIAN PROTOKOL**																	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		**999.970.240**	-	-	-	-	**955.462.696**	-	-	-	-	**95,55%**	-	-	-	-		
	Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah	528.060.000	-	-	-	-	518.814.560	-	-	-	-	98,25%	-	-	-	-		
	kegiatan Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	359.197.240	-	-	-	-	328.553.523	-	-	-	-	91,47%	-	-	-	-		
	Kegiatan Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten	112.713.000	-	-	-	-	108.094.613	-	-	-	-	95,90%	-	-	-	-		
IX	**BAGIAN UMUM**																	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan		**2.773.688.652**	-	-	-	-	**2.670.973.372**	-	-	-	-	**96,30%**	-	-	-	-		
	Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan	2.465.298.448	-	-	-	-	2.437.721.905	-	-	-	-	98,88%	0	0	0	0		
	Kegiatan Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	205.817.784	-	-	-	-	149.728.610	-	-	-	-	72,75%	0	0	0	0		
	Kegiatan Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	102.572.420	-	-	-	-	83.522.857	-	-	-	-	81,43%	0	0	0	0		
X	**BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL**																	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah		**#VALUE!**	**6.783.776.364**	**8.429.682.213**	**8.679.794.422**	**7.963.775.508**	**#VALUE!**	**6.489.950.283**	**8.113.867.910**	**7.558.688.986**	**7.663.663.456**	-	**95,67%**	**96,25%**	**87,08%**	**96,23%**		
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	**5.420.401.126**	**5.595.719.329**	**6.197.760.422**	**5.341.785.508**	-	**5.169.933.250**	**5.370.641.076**	**5.105.193.880**	**5.068.065.892**	-	**95,38%**	**95,98%**	**82,37%**	**94,88%**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	737.865.565	823.311.631	985.930.813	1.106.801.048	-	726.062.423	785.644.620	958.772.499	1.067.567.793	-	98,40%	95,42%	97,25%	96,46%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	545.702.128	514.119.451	172.996.910	456.637.235	-	536.912.800	505.953.027	171.505.794	438.437.119	-	98,39%	98,41%	99,14%	96,01%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	4.136.833.433	4.258.288.247	5.038.832.699	3.778.347.225	-	3.906.958.027	4.079.043.429	3.974.915.587	3.562.060.980	-	94,44%	95,79%	78,89%	94,28%		
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	**1.363.375.238**	**2.833.962.884**	**2.482.034.000**	**2.621.990.000**	-	**1.320.017.033**	**2.743.226.834**	**2.453.495.106**	**2.595.597.564**	-	**96,82%**	**96,80%**	**98,85%**	**98,99%**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	-	652.869.999	1.729.212.820	1.649.786.000	1.762.328.000	-	622.137.920	1.648.989.113	1.638.106.600	1.760.928.253	-	95,29%	95,36%	99,29%	99,92%		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	696.877.239	1.083.340.064	807.758.000	835.167.000	-	684.471.113	1.072.857.721	791.130.506	810.246.311	-	98,22%	99,03%	97,94%	97,02%		
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	13.628.000	21.410.000	24.490.000	24.495.000	-	13.408.000	21.380.000	24.258.000	24.423.000	-	98,39%	99,86%	99,05%	99,71%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
XI SEKRETARIAT DAERAH																	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	**33.409.532.533**	**33.348.890.317**	**33.577.188.196**	-	-	**31.068.383.245**	**31.191.376.958**	**31.141.092.286**	-	-	**92,99%**	**93,53%**	**92,74%**		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**18.341.000**	**83.737.040**	**105.190.000**	**93.262.000**	-	**15.606.000**	**79.716.940**	**104.482.700**	**92.030.500**	-	**85,09%**	**95,20%**	**99,33%**	**98,68%**		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5.231.000	45.598.040	40.666.000	43.096.000	-	4.416.000	43.327.040	40.567.000	43.088.000	-	84,42%	95,02%	99,76%	99,98%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	4.795.000	5.407.000	-	-	-	4.784.700	5.228.000	-	-	-	99,79%	96,69%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	3.913.000	4.119.000	-	-	-	3.858.800	4.042.000	-	-	-	98,61%	98,13%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	6.240.000	8.147.000	4.349.000	4.326.000	-	4.830.000	7.951.000	4.340.000	4.204.000	-	77,40%	97,59%	99,79%	97,18%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	3.776.000	4.119.000	-	-	-	3.745.000	3.606.000	-	-	-	99,18%	87,55%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5.270.000	21.142.000	39.251.000	19.820.000	-	4.760.000	20.481.400	39.179.000	19.602.500	-	90,32%	96,88%	99,82%	98,90%		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.600.000	8.850.000	8.440.000	12.375.000	-	1.600.000	7.957.500	8.008.200	12.260.000	-	100,00%	89,92%	94,88%	99,07%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	**11.814.000**	**24.794.880.287**	**24.828.981.000**	**25.776.901.000**	-	**11.736.000**	**22.716.402.754**	**23.134.598.825**	**24.075.756.592**	-	**99,34%**	**91,62%**	**93,18%**	**93,40%**		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-		24.478.137.000	24.487.222.000	25.432.981.000	-		22.401.352.989	22.793.664.817	23.733.903.472	-	-	91,52%	93,08%	93,32%		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	600.000	142.003.911	131.611.000	143.310.000	-	598.000	141.508.760	131.212.100	143.238.500	-	99,67%	99,65%	99,70%	99,95%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.276.000	10.010.000	4.272.000	6.611.000	-	1.220.000	9.932.000	4.200.000	6.500.000	-	95,61%	99,22%	98,31%	98,32%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1.276.000	58.786.820	55.682.000	62.544.000	-	1.260.000	58.743.487	55.673.000	62.515.000	-	98,75%	99,93%	99,98%	99,95%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	800.000	4.327.000	4.724.000	4.949.000	-	800.000	4.258.000	4.573.100	4.833.000	-	100,00%	98,41%	96,81%	97,66%		
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	560.000	5.363.000	5.495.000	6.620.000	-	560.000	4.905.000	5.473.000	5.369.000	-	100,00%	91,46%	99,60%	81,10%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5.742.000	90.880.556	135.214.000	115.234.000	-	5.738.000	90.425.518	135.044.608	114.838.620	-	99,93%	99,50%	99,87%	99,66%		
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1.560.000	5.372.000	4.761.000	4.652.000	-	1.560.000	5.277.000	4.758.200	4.559.000	-	100,00%	98,23%	99,94%	98,00%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	**1.014.946.000**	**1.101.843.000**	**1.220.709.000**	-	-	**979.164.341**	**1.098.900.000**	**793.697.268**	-	-	**96,47%**	**99,73%**	**65,02%**		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	140.546.000	58.509.000	58.509.000			105.174.070	55.566.000	54.243.000	-	-	74,83%	94,97%	92,71%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	2.400.000	1.334.000	3.200.000			2.319.317	1.334.000	1.454.268	-	-	96,64%	100,00%	45,45%		
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	872.000.000	1.042.000.000	1.159.000.000			871.670.954	1.042.000.000	738.000.000	-	-	99,96%	100,00%	63,68%		
Sub KegiatanPenyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	**9.702.000**	**143.874.204**	**204.550.000**	**211.861.000**	-	**9.698.000**	**143.194.065**	**204.288.000**	**211.427.500**	-	**99,96%**	**99,53%**	**99,87%**	**99,80%**		
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	6.422.000	6.825.000	-	-	-	6.392.000	6.690.600	-	-	-	99,53%	98,03%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	3.819.000	4.709.000	-	-	-	3.796.000	4.610.000	-	-	-	99,40%	97,90%		
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	9.350.000	8.140.000	-	-	-	9.350.000	8.131.000	-	-	-	100,00%	99,89%		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	9.702.000	143.874.204	178.111.000	185.615.000	-	9.698.000	143.194.065	177.996.600	185.507.900	-	99,96%	99,53%	99,94%	99,94%		
Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	6.848.000	6.572.000	-	-	-	6.753.400	6.488.000	-	-	-	98,62%	98,72%		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	**30.000.000**	**59.903.000**	**70.354.000**	-	-	**30.000.000**	**59.459.000**	**70.251.500**	-	-	**100,00%**	**99,26%**	**99,85%**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	30.000.000	54.000.000	64.000.000	-	-	30.000.000	54.000.000	63.950.000	-	-	100,00%	100,00%	99,92%		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	5.903.000	6.354.000	-	-	-	5.459.000	6.301.500	-	-	-	92,48%	99,17%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	**119.360.047**	**3.264.381.314**	**3.453.430.649**	**3.332.574.617**	-	**118.923.439**	**3.218.764.718**	**3.389.588.282**	**3.257.746.375**	-	**99,63%**	**98,60%**	**98,15%**	**97,75%**		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	3.125.400	21.172.800	22.284.300	19.888.000	-	3.125.400	20.930.300	22.036.375	19.254.100	-	100,00%	98,85%	98,89%	96,81%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	86.258.239	908.451.656	735.489.644	802.490.162	-	86.238.239	895.281.149	723.084.626	789.396.650	-	99,98%	98,55%	98,31%	98,37%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	95.764.725	107.425.075	-	-	-	88.104.800	103.891.800	-	-	-	92,00%	96,71%		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	23.384.408	198.583.858	183.901.630	209.664.380	-	23.053.200	191.908.930	180.091.650	189.756.350	-	98,58%	96,64%	97,93%	90,50%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	2.445.000	71.860.000	63.466.600	57.180.000	-	2.368.600	70.590.045	62.326.400	56.031.675	-	96,88%	98,23%	98,20%	97,99%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	4.147.000	2.064.313.000	2.352.523.750	2.135.927.000	-	4.138.000	2.040.054.294	2.313.944.431	2.099.415.800	-	99,78%	98,82%	98,36%	98,29%		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	**75.936.377**	**1.525.344.300**	**931.995.690**	**640.040.600**	**-**	**71.837.800**	**1.449.771.020**	**637.342.580**	**581.037.185**	-	**94,60%**	**95,05%**	**68,38%**	**90,78%**		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	75.936.377	1.525.344.300	931.995.690	640.040.600	-	71.837.800	1.449.771.020	637.342.580	581.037.185	-	94,60%	95,05%	68,38%	90,78%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**285.047.112**	**563.193.248**	**679.408.400**	**662.406.000**	-	**270.637.549**	**550.321.045**	**673.876.348**	**659.471.777**	-	**94,94%**	**97,71%**	**99,19%**	**99,56%**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	3.000.000	320.116.998	349.226.000	339.156.000	-	2.500.000	316.697.940	348.029.891	338.688.372	-	83,33%	98,93%	99,66%	99,86%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1.200.000	46.316.250	38.582.400	32.850.000	-	1.200.000	42.354.318	38.086.457	31.588.655	-	100,00%	91,45%	98,71%	96,16%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	280.847.112	196.760.000	291.600.000	290.400.000	-	266.937.549	191.268.787	287.760.000	289.194.750	-	95,05%	97,21%	98,68%	99,58%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**337.566.000**	**1.989.176.140**	**1.983.588.578**	**1.569.079.979**	-	**323.549.550**	**1.901.048.362**	**1.888.841.223**	**1.399.673.589**	-	**95,85%**	**95,57%**	**95,22%**	**89,20%**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	29.966.000	922.898.800	917.009.178	1.026.631.279	-	19.653.550	852.131.731	846.113.545	888.808.817	-	65,59%	92,33%	92,27%	86,58%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	20.420.000	32.440.000	37.990.000	-	-	19.209.120	28.726.885	27.407.273	-	-	94,07%	88,55%	72,14%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	13.600.000	111.445.000	114.394.400	129.958.700	-	13.441.000	98.819.950	99.194.750	111.665.900	-	98,83%	88,67%	86,71%	85,92%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	294.000.000	724.412.340	333.745.000	192.500.000	-	290.455.000	721.950.061	331.680.200	190.525.490	-	98,79%	99,66%	99,38%	98,97%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	210.000.000	586.000.000	182.000.000	-	-	208.937.500	583.125.843	181.266.109	-	-	99,49%	99,51%	99,60%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tabel 2.15 Kelompok Sasaran Layanan

NO.	SASARAN	PROGRAM	UNIT KERJA	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	OPD mitra terkait kesejahteraan rakyat (bina mental, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat)
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan		Bagian Tata Pemerintahan	Semua OPD Kota Yogyakarta
			Bagian Hukum	
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	BUMD, BLUD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, OPD terkait pengembangan ekonomi kreatif, OPD terkait pembinaan UKM
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan		Bagian Administrasi Pembangunan	Semua OPD Kota Yogyakarta
			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua OPD Kota Yogyakarta dan penyedia barang/jasa
5.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatatlaksanaan	Bagian Organisasi	Semua OPD Kota Yogyakarta
		Program Penunjang	Bagian Umum dan Protokol	

NO.	SASARAN	PROGRAM	UNIT KERJA	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
6.	Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bagian Administrasi dan Keuangan	Unit Kerja yang ada di Sekretariat Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Menggarisbawahi betapa krusialnya peran kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, terutama perangkat daerah dan mitra-mitra terkait, dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat, maka mitra masing-masing Bagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Pemerintahan
   a. Inspektorat : Reviu LPPD
   b. Perangkat Daerah pengampu Indikator LPPD : Penyediaan data dan data dukung Indikator LPPD
   c. Perangkat Daerah pengampu SPM, Bappeda, BPKAD : Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan SPM
   d. Seluruh Perangkat Daerah : Pengumpulan data pelaksanaan administrasi pemerintahan, Penyediaan data dukung penyusunan LKPJ dan tindak lanjut rekomendasi LKPJ
   e. Bakesbangpol, Satpol PP, Polresta Yogyakarta, KPU, Bawaslu : Tim Koordinasi fasilitasi Pilkada
   f. Satpol PP, Bagian Hukum : Pengumpulan data Trantibumlinmas
   g. DPUPKP, Dispertaru, BPKAD : Penyediaan Data dukung unsur buatan toponimi
   h. Kelurahan, Kemantren dan Perangkat Daerah terkait : Monev Pelaksanaan Perwal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, Fasilitasi koordinasi penyusunan Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta, Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Kelurahan
   i. Kelurahan, Kemantren, Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait : Monev Pelaksanaan Perwal Pelayanan Kemantren dan Kelurahan berbasis elektronik, Fasilitasi koordinasi penyusunan Data Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta, Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan/Kemantren Tingkat Kota Yogyakarta

j. LPMK, Pengurus Kampung, RT, RW, Kelurahan dan Kemantren dan PD terkait : Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Koordinasi Pemilihan Pengurus RT dan RW
k. Kelurahan, Kemantren, Dinas Dukcapil : Monev penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   a. Tim Kerja Bina Mental : MUI, Kementrian Agama, dan Baznas
   b. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial : Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   c. Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kebudayaan
3. Bagian Hukum
   a. Kementerian Hukum;
   b. Kementerian HAM;
   c. Kementerian Dalam Negeri;
   d. Kementerian/Lembaga terkait;
   e. Pemda DIY;
   f. Forkompimda;
   g. DPRD Kota Yogyakarta;
   h. Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Bagian Umum dan Protokol
   a. Terfasilitasinya layanan Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli : Bag. Organisasi, DPK, Diskominfosan
   b. Terfasilitasinya Penyediaan Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah: BPBJ, BPKAD
   c. Terfasilitasinya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan : Diskominfosan, Bagian Organisasi
5. Bagian Administrasi dan Keuangan
   a. Semua OPD yang terkait dengan tindak lanjut open house
   b. BPKAD terkait Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset.
   c. Bappeda terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan.
   d. BKPSDM terkait Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan.
   e. Diskominfo terkait Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral.
   f. Inspektorat terkait Pengawasan dan Consulting.
   g. DPK terkait pengelolaan kearsipan.
6. Bagian Perekonomian dan Kerjasama
   a. Kerja Sama Daerah
      1. OPD yang mengusulkan dan melaksanakan Kerja Sama
      2. Mitra Kerja Sama

b. Pembinaan BUMD dan BLUD
    1. Semua BUMD dan BLUD, Dinas Kesehatan, BPKAD, BAPPEDA
c. Pengendalian Perekonomian UMKM dan Ekonomi Kreatif
    1. BPKAD, BAPPEDA, Dinas PKU, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kebudayaan, DPMPTSP, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan
    2. BI, OJK, Lembaga Keuangan, Pemda DIY
    3. Pelaku Ekonomi Kreatif

7. Bagian Administrasi Pembangunan
    a. Bappeda terkait dengan Data Kinerja pelaksanaan pekerjaan Pemkot
    b. BPKAD terkait dengan realisasi keuangan dalam pelaporan
    c. Inspektorat terkait dengan pengawasan daerah
    d. Bagian PBJ terkait dengan proses pengadaan pekerjaan
    e. Dinas PU terkait dengan pekerjaan konstruksi
    f. DLH terkait dengan pengelolaan sampah
    g. BKPSDM terkait dengan pengendalian dan penataan SDM
    h. Bagor terkait dengan pengendalian dan penataan SDM
8. Bagian Organisasi
    a. BKPSDM :
        - Perencanaan pengadaan SDM, evaluasi jabatan
        - Budaya kerja Berakhlak
    b. Kundha Kabudayan : Pelaksanaan Kelembagaan dan tusi keistimewaan
    c. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana : Pelaksanaan Kelembagaan dan tusi keistimewaan
    d. Bappeda :
        - Proses Bisnis RPJMD
        - Pelaksanaan Kelembagaan dan tusi keistimewaan
        - Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, desk timbal balik
    e. Inspektorat, Bappeda :
        - Evaluasi SAKIP
        - Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja
9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    a. Internal : BAPPEDA BPKAD, Inspektorat, Opd Pemilik Kegiatan
    b. Eksternal : LKPP, KPK, BPKP, APH.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peranan krusial dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Peran penting ini terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu melalui penyediaan layanan publik, peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agar peranan BUMD dan BLUD ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal, diperlukan pembinaan yang efektif dari perangkat daerah. Pembinaan ini khususnya difokuskan pada tiga area utama:

a. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), memastikan bahwa personel yang terlibat memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai.
b. Perencanaan dan evaluasi kinerja, yang melibatkan penetapan target yang jelas dan penilaian berkala terhadap pencapaian kinerja.
c. Kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola, memastikan bahwa operasional BUMD dan BLUD berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dengan pembinaan yang tepat di area-area tersebut, BUMD dan BLUD diharapkan dapat memberikan dukungan terbaik bagi kinerja perangkat daerah dan pada akhirnya meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui serangkaian perjanjian kerja sama. Sepanjang periode kerja sama yang tercatat, sebanyak 24 dokumen perjanjian kerja sama telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai bidang urusan pemerintahan yang strategis dan memiliki masa berlaku yang bervariasi.

Masa berakhirnya perjanjian ini tersebar hingga beberapa tahun ke depan, menunjukkan perencanaan jangka panjang:

- 19 perjanjian akan berakhir pada tahun 2025.
- 2 perjanjian akan berakhir pada tahun 2028.
- 1 perjanjian akan berakhir pada tahun 2029.
- 2 perjanjian lainnya akan berakhir pada tahun 2030.

Fokus utama dari kerja sama ini sangat beragam, namun bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menjadi yang paling dominan. Selain itu, kerja sama juga meliputi bidang-bidang penting lainnya seperti Perekonomian Daerah, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, serta Bantuan Hukum.

Secara keseluruhan, mayoritas perjanjian ini secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, serta untuk memperkuat layanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan inklusif bagi warganya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.16 Identifikasi Permasalahan Layanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	**Bagian Tata Pemerintahan**		
	1. Nilai LPPD Pemerintah Kota Yogyakarta tidak optimal 2. Nilai perkembangan pembangunan wilayah belum tentu meningkat dari tahun ke tahun di masing-masing kelurahan, bahkan memungkinkan nilai nya justru turun.	1. Terdapat kesulitan memperoleh data yang bersumber dari luar OPD pengampu dan kurangnya tertib administrasi dalam pengelolaan data IKK dan data dukungnya 2. Adanya faktor eksternal yang seringkali di luar kendali dari Lurah maupun Mantri Pamong Praja, meskipun pencegahannya telah dilakukan di wilayah, namun pada kenyataannya kasusnya masih sering terjadi, seperti masalah keamanan dan ketertiban yakni kasus kriminalitas yang ada di wilayah dan masalah kesehatan seperti kematian	1. a. Terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang pemenuhan datanya belum dapat dilaksanakan oleh OPD, sehingga data yang disajikan belum lengkap (bisa terjadi karena dari OPD belum ada pendataan atau belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka pemenuhan data IKK). b. Dalam collecting data, pengolahan data dan penyajian data dukung belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ibu dan bayi.	2. Permasalahan eksternal di bidang kemasyarakatan seperti kriminalitas dan kematian ibu/bayi merupakan faktor eksternal yang kompleks di masyarakat dengan berbagai kemungkinan penyebab antara lain seperti kemiskinan, gizi buruk, pendidikan rendah. Meskipun upaya pencegahan telah sering dilakukan oleh kelurahan, masalah-masalah ini tidak dapat serta merta dicegah sepenuhnya karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional, di luar kendali penuh perangkat daerah, kelurahan maupun kemantren.
2.	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
	1. Kebijakan PKL yang ada saat ini kurang implementatif 2. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1. Kebijakan PKL sebelumnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini 2. Rendahnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu membangun atau memperbaiki rumah yang layak huni	1. Kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur telah berubah 2. Ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	**Bagian Hukum**		
	1. Permasalahan terkait pembentukan produk hukum daerah 2. Permasalahan terkait Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Permasalahan terkait Pendokumentasian dan Penyebarluasan Informasi Hukum	1. a. Keterbatasan informasi dan respon dari OPD pengusul dalam mengusulkan produk hukum baik yang masuk dalam propemperda dan propemperkada b. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tergantung dengan penjadwalan pembahasan dari DPRD Kota Yogyakarta c. Dalam pembentukan rancangan peraturan walikota tergantung kesiapan OPD pemrakarsa d. OPD menunggu regulasi teknis yang kurang lengkap di tingkat Pemerintah Pusat e. OPD kurang merespon tindaklanjut dari suatu regulasi yang didelegasikan 2. Berkaitan dengan HAM, masih terdapat	1. a. kurangnya pemahaman OPD dalam menindaklanjuti penyusunan produk hukum di Tingkat daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga menghambat usulan dalam propemperda dan propemperkada b. penyusunan perda harus melibatkan dewan, sementara jadwal dewan yang padat c. kurangnya informasi OPD dalam mereview dan merespon kebutuhan regulasi d. kurang lengkapnya perangkat regulasi yang ada di pemerintah pusat, sehingga menghambat penyusunan regulasi di tingkat daerah, khususnya pengaturan secara teknis dalam bentuk rancangan peraturan walikota

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		beberapa parameter penilaian dalam RANHAM dan KKP HAM yang sulit untuk dipenuhi oleh Pemerintah Yogyakarta sehingga dapat menghambat optimalisasi perolehan penilaian. 3. a. Perubahan metadata JDIHN yang memerlukan penyesuaian teknis. b. Keterbatasan fasilitas ruangan untuk pendokumentasian produk hukum. c. Kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum sering terhambat	e. kurangnya informasi OPD terhadap ini materi regulasi, sehingga tindak lanjut dari suatu produk hukum daerah menjadi tidak berjalan 2. *Hak atas pekerjaan:* Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah yang mana dalam parameternya harus ada lebih dari sama dengan 2% dr jml pegawai, padahal kita tidak ada 2% untuk pegawai penyandang disabilitas, karena tidak semua formasi disabilitas yang dibuka, ada pendaftarnya. *Hak atas perempuan dan anak:* Adanya pekerja anak, padahal kalau ada anak yg dipekerjakan, kita kena sanksi. *Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak:* • Persentase tersedianya RTH (ruang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terbuka hijau) sebesar 30% dari luas perkotaan, padahal kita keterbatasn wilayah untuk mencapai luas RTH 30%. • Persentase tersedianya fasum, sarana Olah raga, dan taman sebesar 10% dari RTH 3. a. Tidak bisa dengan cepat mengikuti perubahan regulasi metadata dari BPHN Kemenkum RI karena tidak mengelola JDIH secara langsung b. Banyaknya dokumen produk hukum daerah yang diterbitkan setiap tahunnya. c. Kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum baru dapat terlaksana dengan lancar apabila kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah telah selesai dilaksanakan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	**Bagian Umum dan Protokol**		
	Belum optimalnya pelayanan terhadap penerimaan tamu dinas	1. Penerimaan tamu dinas yang belum tersentralisasi secara keseluruhan 2. Kesulitan dalam menyosialisasikan aplikasi penerimaan tamu kunjungan kerja kepada seluruh calon tamu dinas 3. Aplikasi penerimaan tamu kunjungan kerja belum terintegrasi dengan aplikasi terkait paket wisata maupun jadwal event kesenian/kebudayaan	1. Kurang optimalnya pelaksanaan SOP penerimaan tamu oleh perangkat daerah penerima tamu dinas. 2. Belum adanya wadah resmi yang dapat digunakan untuk menginformasikan terkait prosedur dan penggunaan aplikasi penerimaan tamu kunjungan kerja kepada calon tamu dinas khususnya dari pusat 3. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait khususnya dalam promosi pariwisata Kota Yogyakarta
5.	**Bagian Administrasi dan Keuangan**		
	1. Adanya masyarakat yang datang ke open house lebih dari 1 kali dengan permasalahan yang sama 2. Adanya resiko temuan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta terkait perbedaan data barang antara RKBMD Setda dengan DPA Setda	1. Tindak lanjut permasalahan pada saat open house tidak terinformasikan kepada masyarakat 2. Ketidaksinkronan data barang antara RKBMD Setda dengan DPA Setda 3. Adanya resiko kesalahan dalam menginput klasifikasi kode rekening	1. Belum adanya sistem informasi yang mewadahi open house 2. a. Belum adanya aplikasi yang mengintegrasikan data barang pada RKBMD dengan data barang pada DPA b. Kurangnya fasilitasi penyempurnaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	3. Adanya resiko temuan dari pemeriksaan oleh BPK atau Inspektorat dalam penatausahaan keuangan	belanja barang/jasa pada SIPD	RKBMD dari Bidang pengampu Aset Kota yogyakarta 3. a. Personil perencana dan pengelola keuangan kurang memahami regulasi terkait pengklasifikasian kode rekening belanja barang/jasa b. Kesalahan setting kode belanja barang/jasa di dari Bidang pengampu SIPD Kota Yogyakarta
6.	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama**		
	1. Belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah	1. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Yogyakarta 2. Belum optimalnya tindak lanjut kerja sama daerah	1. Penyebab belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Yogyakarta karena penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang belum maksimal atau masih lemah. 2. Penyebab aspek perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah belum

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			optimal karena para pihak yang akan bekerjasama kurang memahami kebutuhan dan tujuan kerja sama
7.	**Bagian Administrasi Pembangunan**		
	Belum optimalnya capaian pekerjaan fisik baik fisik konstruksi maupun fisik non konstruksi serta belum tertibnya pengadministrasian dokumen perencanaan fisik konstruksi	1. Belum tercapainya realisasi fisik kegiatan di seluruh OPD (tingkat Pemkot) sesuai dengan target 2. Belum optimalnya kualitas pekerjaan pembanguan strategis dan prioritas 3. Belum tertibnya administrasi kontrak khususnya di wilayah	1. Kurangnya pemahaman mengenai perencanaan target fisik pelaksanaan kegiatan 2. Kurangnya mekanisme pengawasan kualitas terhadap pekerjaan pembangunan strategis dan prioritas 3. Kurangnya pemahaman penyusunan kontrak pekerjaan di OPD
8.	**Bagian Organisasi**		
	Anggaran belanja pegawai yang sudah lebih dari 30% dari anggaran total	Kelembagaan yang terlalu besar yang berdampak pada kebutuhan jumlah SDM yang juga besar	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam undang-undang ini, membatasi alokasi belanja pegawai Daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lambat tahun 2027.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
9.	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**		
	Prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan barang dan jasa belum terlaksana dengan optimal	1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak dilakukan dengan baik 2. Adanya Kendala dalam Pelaksanaan e-purchasing	1. Kurangnya pemahaman PPKom dalam menyusun perencanaan pengadaan 2. Penyusunan tatakala dan pemilihan metode pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan belum tepat 3. Aplikasi e-Katalog V.6 belum sempurna dan belum terintegrasi dengan sistem keuangan 4. Pilihan penyedia dan produk barang dan jasa dalam e-katalog V.6 terbatas 5. Kurasi produk ber TKDN/PDN yang tayang pada e-katalog V.6 sering tidak Valid 6. PPK dan Penyedia belum memahami penggunaan aplikasi e-katalog V-6

2.2.2 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Perumusan Isu Strategis dapat dilihat di tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.17 Perumusan Isu Strategis

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	1. Terdapat kesulitan memperoleh data yang bersumber dari luar OPD pengampu dan kurangnya tertib administrasi dalam pengelolaan data IKK dan data dukungnya 2. Adanya faktor eksternal yang seringkali di luar	1. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi 2. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 3. Penurunan kualitas dan kuantitas air	1. Perubahan iklim dan ketahanan kota 2. Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 3. Ketidakpastian kondisi ekonomi	1. Tantangan transisi ke kota rendah emisi dan berketahanan lingkungan 2. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan budaya di Perkotaan 3. Peran Kota Yogyakarta dalam	1. Penetapan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia dan implikasinya 2. Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY 3. Implementasi pengelolaan	Peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pengembangan kewilayahan

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		kendali dari Lurah maupun Mantri Pamong Praja, meskipun pencegahannya telah dilakukan di wilayah, namun pada kenyataannya kasusnya masih sering terjadi, seperti masalah keamanan dan ketertiban yakni kasus kriminalitas yang ada di wilayah dan masalah kesehatan seperti kematian ibu dan bayi.	Tanah 4. Kurangnya ruang terbuka hijau publik 5. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi 6. Belum optimalnya transportasi publik	global 4. Disrupsi informasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan yang meningkat	mendukung pencapaian program prioritas nasional	Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		1. Kebijakan PKL sebelumnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini 2. Rendahnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu membangun atau memperbaiki rumah yang layak huni					Peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat
		1. Keterbatasan informasi dan respon dari OPD pengusul dalam mengusulkan produk hukum					Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah (regulasi dan kebijakan hukum

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		baik yang masuk dalam propemperda dan propemperkada 2. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tergantung dengan penjadwalan pembahasan dari DPRD Kota Yogyakarta 3. Dalam pembentukan rancangan peraturan walikota tergantung kesiapan OPD					lain)

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		pemrakarsa 4. OPD menunggu regulasi teknis yang kurang lengkap di tingkat Pemerintah Pusat 5. OPD kurang merespon tindaklanjut dari suatu regulasi yang didelegasikan 6. Berkaitan dengan HAM, masih terdapat beberapa parameter penilaian dalam RANHAM dan KKP HAM yang sulit untuk dipenuhi					

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		oleh Pemerintah Yogyakarta sehingga dapat menghambat optimalisasi perolehan penilaian 7. Perubahan metadata JDIHN yang memerlukan penyesuaian teknis 8. Keterbatasan fasilitas ruangan untuk pendokumentasian produk hukum 9. Kegiatan pendokumentasian dan					

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		penyebarluasan informasi hukum sering terhambat					
		1. Penerimaan tamu dinas yang belum tersentralisasi secara keseluruhan 2. Kesulitan dalam menyosialisasikan aplikasi penerimaan tamu kunjungan kerja kepada seluruh calon tamu dinas 3. Aplikasi penerimaan tamu kunjungan kerja belum terintegrasi dengan aplikasi terkait paket wisata maupun jadwal					Peningkatan tata kelola Setda, fasilitasi pelayanan pimpinan dan internal Setda

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		event kesenian/ kebudayaan 4. Tindak lanjut permasalahan pada saat open house tidak terinformasikan kepada masyarakat 5. Ketidaksinkronan data barang antara RKBMD Setda dengan DPA Setda 6. Adanya resiko kesalahan dalam menginput klasifikasi kode rekening belanja barang/jasa pada SIPD					
		1. Belum optimalnya kontribusi BUMD					Peningkatan kinerja

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		terhadap PAD Kota Yogyakarta 2. Belum optimalnya tindak lanjut kerja sama daerah					perekonomian dan kerja sama
		1. Belum tercapainya realisasi fisik kegiatan di seluruh OPD (tingkat Pemkot) sesuai dengan target 2. Belum optimalnya kualitas pekerjaan pembanguan strategis dan prioritas 3. Belum tertibnya administrasi kontrak					Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur strategis

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		khususnya di wilayah					
		Kelembagaan yang terlalu besar yang berdampak pada kebutuhan jumlah SDM yang juga besar					Optimalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien
		1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak dilakukan dengan baik 2. Adanya Kendala dalam Pelaksanaan e-purchasing					Pemanfaatan teknologi dan sistem digital dalam pengadaan barang/jasa

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. Peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pengembangan kewilayahan

2. Peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah (regulasi dan kebijakan hukum lain)
4. Peningkatan tata kelola Setda, fasilitasi pelayanan pimpinan dan internal Setda
5. Peningkatan kinerja perekonomian dan kerja sama
6. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur strategis
7. Optimalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien
8. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital dalam pengadaan barang/jasa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Penetapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah harus diselaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"** Misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yaitu :

1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
2. Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
3. Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
4. Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Misi 5 : Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengampu Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945".

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah ditetapkan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah											
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (Predikat)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	-	49.88	53.01	55.76	58.20	60.37	62.33	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Predikat)	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Bagian Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Perekonomian dan Kerjasama
		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota (Indeks)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi Bagian Umum dan Protokol
		Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	Bagian Administrasi dan Keuangan
		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian (Nilai)	93.01	85.33	89.13	91.29	91.99	93.85	94.55	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pembangunan (Indeks)	91.57	91.95	92.39	92.83	93.28	93.72	94.16	Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Penentuan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian 4. Meningkatnya kualitas kebijakan Pembangunan 5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum 6. Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	1. Meningkatkan koordinasi lintas OPD atau lintas sektoral 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan yg efektif dan efisien 3. Meningkatkan kinerja BUMD & BLUD 4. Meningkatkan kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama daerah 6. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrtuktur strategis 7. Mengoptimalkan penggunaaan teknologi sistem pengadaan barang/jasa 8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan keprotokolan 9. Mengoptimalkan capaian 8 parameter penilaian reformasi birokrasi Setda

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan Meningkatnya tata kelola Setda	1. Peningkatan kualitas kebijakan daerah, melalui: a. Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi umum b. Mempercepat penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi c. Menata kelembagaan dan melakukan peningkatan kapasitas aparatur daerah sesuai kebutuhan daerah 2. Perluasan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan *stakeholder* lainnya	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pelaksanaan kesejahteraan sosial 3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat 4. Pendampingan administrasi pemerintahan kepada OPD 5. Pendampingan administrasi kewilayahan kepada OPD 6. Penguatan kapasitas SDM bidang hukum	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang baik dan adaptif	untuk mewujudkan tujuan pembangunan a. Meningkatkan kualitas layanan umum dan keprotokolan b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan c. Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan	7. Pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan regulasi atau kebijakan daerah 8. Perluasan dan perbaikan metode pembudayaan hukum 9. Penataan kelembagaan dan anjab perangkat daerah 10. Pendampingan SAKIP dan RB OPD 11. Pendampingan ketatalaksanaan perangkat daerah & pelayanan publik 12. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pada BUMD & BLUD 13. Meningkatkan pengendalian terhadap perencanaan BUMD & BLUD 14. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi BUMD & BLUD 15. Menyusun kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah,	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			percepatan akses keuangan daerah, perluasan & percepatan digitalisasi daerah 16. Menyusun kebijakan terkait pembiayaan keuangan usaha mikro 17. Menyusun kebijakan terkait UMKM dan/atau ekraf 18. Pendampingan dalam penyusunan dokumen pemetaan kerja sama daerah 19. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah 20. Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan pembangunan 21. Meningkatkan pengendalian kebijakan isu strategis pembangunan 22. Meningkatkan pengendalian &	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur 23. Meningkatkan evaluasi & pelaporan ketepatan pelaksanaan pembangunan 24. Meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa 25. Menyusun kebijakan terkait pemilihan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa 26. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan 27. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu dinas 28. Meningkatkan pengelolaan aset dan penatausahaan keuangan Setda 29. Meningkatkan pengelolaan arsip Setda 30. Meningkatkan kualitas data	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			statistik sektoral Setda 31. Meningkatkan kualitas ASN Setda 32. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa Setda 33. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dirumuskan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan secara ringkas tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang ingin diwujudkan, serta strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai upaya memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian 4. Meningkatnya kualitas kebijakan Pembangunan 5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum 6. Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	1. Meningkatkan koordinasi lintas OPD atau lintas sektoral 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan yg efektif dan efisien 3. Meningkatkan kinerja BUMD & BLUD 4. Meningkatkan kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama daerah 6. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrtuktur strategis 7. Mengoptimalkan penggunaaan	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pelaksanaan kesejahteraan sosial 3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat 4. Pendampingan administrasi

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		teknologi sistem pengadaan barang/jasa 8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan keprotokolan 9. Mengoptimalkan capaian 8 parameter penilaian reformasi birokrasi Setda	pemerintahan kepada OPD 5. Pendampingan administrasi kewilayahan kepada OPD 6. Penguatan kapasitas SDM bidang hukum 7. Pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan regulasi atau kebijakan daerah 8. Perluasan dan perbaikan metode pembudayaan hukum 9. Penataan kelembagaan dan anjab perangkat daerah 10. Pendampingan SAKIP dan RB OPD 11. Pendampingan ketatalaksanaan perangkat daerah & pelayanan publik 12. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pada BUMD & BLUD 13. Meningkatkan pengendalian terhadap perencanaan BUMD & BLUD 14. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi BUMD & BLUD 15. Menyusun kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah, percepatan akses keuangan daerah, perluasan & percepatan digitalisasi daerah 16. Menyusun kebijakan terkait pembiayaan keuangan usaha mikro 17. Menyusun kebijakan terkait UMKM dan/atau ekraf 18. Pendampingan dalam penyusunan dokumen

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemetaan kerja sama daerah 19. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah 20. Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan pembangunan 21. Meningkatkan pengendalian kebijakan isu strategis pembangunan 22. Meningkatkan pengendalian & pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur 23. Meningkatkan evaluasi & pelaporan ketepatan pelaksanaan pembangunan 24. Meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan barang

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan jasa 25. Menyusun kebijakan terkait pemilihan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa 26. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan 27. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu dinas 28. Meningkatkan pengelolaan aset dan penatausahaan keuangan Setda 29. Meningkatkan pengelolaan arsip Setda 30. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral Setda 31. Meningkatkan kualitas ASN Setda 32. Meningkatkan kualitas

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
MISI	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perencanaan pengadaan barang/jasa Setda 33. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah

3.3. Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Penahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat disajikan seperti pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Penguatan fondasi dan baseline Penyiapan regulasi, baseline data, dan pemetaan permasalahan	**Penguatan kapasitas** Peningkatan SDM dan tatakelola internal	**Percepatan implementasi** Penerapan kebijakan berbasis data dan digitalisasi	**Evaluasi dan konsolidasi** Evaluasi hasil dan pemantapan sistem	**Penyempurnaan dan legacy** Konsolidasi capaian, keberlanjutan, dan transisi ke renstra baru
Meningkatkan kualitas laporan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kewilayahan	Meningkatkan kualitas laporan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kewilayahan	Meningkatkan kualitas laporan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kewilayahan	Meningkatkan kualitas laporan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kewilayahan	• Meningkatkan kualitas laporan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi kewilayahan
• Penguatan koordinasi	• Peningkatan koordinasi	• Efektifitas pelaksanaan	• Efektifitas pelaksanaan	• Efektifitas pelaksanaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
lintas OPD dan/atau lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat • Penguatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	lintas OPD dan/atau lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan analisis hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	koordinasi lintas OPD dan/atau lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat • Penajaman analisis hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	koordinasi lintas OPD dan/atau lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat • Rekomendasi atas analisis hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	koordinasi lintas OPD dan/atau lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat • Tindak lanjut rekomendasi atas analisis hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	• Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	• Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	• Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	• Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan evaluasi atas pelayanan pimpinan secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan evaluasi atas pelayanan pimpinan secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan evaluasi atas pelayanan pimpinan secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan evaluasi atas pelayanan pimpinan secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan evaluasi atas pelayanan pimpinan secara berkelanjutan
Meningkatkan kualitas pelayanan internal Setda dan akuntabilitas Setda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Setda dan akuntabilitas Setda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Setda dan akuntabilitas Setda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Setda dan akuntabilitas Setda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Setda dan akuntabilitas Setda
• Penguatan koordinasi stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan	• Peningkatan koordinasi stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan	• Percepatan koordinasi stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan	• Percepatan koordinasi stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan	• Percepatan koordinasi stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan • Penguatan koordinasi lintas OPD dalam penyusunan kebijakan isu strategis • Optimalisasi pengendalian dan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur • Pengelolaan evaluasi dan pelaporan ketepatan pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan • Peningkatan koordinasi lintas OPD dalam penyusunan kebijakan isu strategis • Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur • Peningkatan evaluasi dan pelaporan ketepatan pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan • Percepatan koordinasi lintas OPD dalam penyusunan kebijakan isu strategis • Percepatan pengendalian dan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur • Percepatan evaluasi dan pelaporan ketepatan pelaksanaan pembangunan	Pembangunan • Percepatan koordinasi lintas OPD dalam penyusunan kebijakan isu strategis • Percepatan pengendalian dan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur • Percepatan evaluasi dan pelaporan ketepatan pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan • Percepatan koordinasi lintas OPD dalam penyusunan kebijakan isu strategis • Percepatan pengendalian dan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur • Percepatan evaluasi dan pelaporan ketepatan pelaksanaan Pembangunan
• Fasilitasi dan evaluasi Kerja Sama • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	• Fasilitasi dan evaluasi Kerja Sama • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	• Fasilitasi dan evaluasi Kerja Sama • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	• Fasilitasi dan evaluasi Kerja Sama • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	• Fasilitasi dan evaluasi Kerja Sama • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Pelaksanaan koordinasi pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	• Pelaksanaan koordinasi pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	• Pelaksanaan koordinasi pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	• Pelaksanaan koordinasi pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	• Pelaksanaan koordinasi pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif
• Evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan Perangkat Daerah • Penyelesaian pengusulan rekomendasi instansi pembina dan penetapan dari KemenpanRB untuk 94 jabatan fungsional • Pendampingan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik • Penyusunan konsep FWA (Flexibel Working	• Penataan kelembagaan Perangkat Daerah • Reviu analisis jabatan Kota Yogyakarta • Pendampingan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik • Uji coba FWA (Flexibel Working Arrangement) • Penyederhanaan Layanan Perizinan dan non perizinan prioritas untuk mempermudah,	• Implementasi hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah • Reviu analisis jabatan Kota Yogyakarta • Pendampingan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik • Evaluasi FWA (Flexibel Working Arrangement) • Penyederhanaan Layanan Perizinan dan non perizinan prioritas untuk	• Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah • Reviu analisis jabatan Kota Yogyakarta • Pendampingan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik • Penerapan FWA (Flexibel Working Arrangement) • Penyederhanaan Layanan Perizinan dan non perizinan prioritas untuk mempermudah,	• Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah • Reviu analisis jabatan Kota Yogyakarta • Pendampingan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik • Optimalisasi penerapan FWA (Flexibel Working Arrangement) • Penyederhanaan Layanan Perizinan dan non perizinan prioritas untuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arrangement) • Penyederhanaan Layanan Perizinan dan non perizinan prioritas untuk mempermudah, mempercepat, dan akuntabel • Penyusunan rencana aksi RB tahun 2026 sesuai grand design dan road map pusat terupdate • Pendampingan perjanjian kinerja murni dan perubahan, serta pendampingan LKIP • Reviu Perwal tentang SAKIP	mempercepat, dan akuntabel • Penyusunan rencana aksi RB tahun 2027 • Pendampingan perjanjian kinerja murni dan perubahan, serta pendampingan LKIP • Pendampingan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	mempermudah, mempercepat, dan akuntabel • Penyusunan rencana aksi RB tahun 2028 • Pendampingan perjanjian kinerja murni dan perubahan, serta pendampingan LKIP	mempercepat, dan akuntabel • Penyusunan rencana aksi RB tahun 2029 • Pendampingan perjanjian kinerja murni dan perubahan, serta pendampingan LKIP • Pendampingan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	mempermudah, mempercepat, dan akuntabel • Penyusunan rencana aksi RB tahun 2030 • Pendampingan perjanjian kinerja murni dan perubahan, serta pendampingan LKIP

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemanfaatan teknologi dan sistem digital • Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap epurchasing, ekatalog dan SPSE • Penyusunan regulasi penggunaan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa	Pemanfaatan teknologi dan sistem digital • Melakukan uji coba sinkronisasi sistem SPSE dengan aplikasi pendukung lainnya (perencanaan, monitoring, dan pelaporan) • Pilot Project Penggunaan pemilihan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa	Pemanfaatan teknologi dan sistem digital • Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem SPSE dengan aplikasi pendukung lainnya (perencanaan, monitoring, dan pelaporan) • Penerapan kebijakan penggunaan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa	Pemanfaatan teknologi dan sistem digital • Perluasan sistem pengadaan digital berbasis data analitik untuk memantau efisiensi pengadaan barang/jasa • Implementasi dan evaluasi penggunaan metode e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa	Pemanfaatan teknologi dan sistem digital • Pencapaian digital procurement untuk mendorong efisiensi pengadaan barang/jasa • Penggunaan e-purchasing secara optimal dan menyeluruh

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja.

4.1. Program Penyelenggaraan Bidang Urusan

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh program-program berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembanguan
4. Program Penyelenggaraan Keiistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kegiatan yang mendukung program kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan

Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penataan Administrasi Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

11. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

12. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dan Fasilitasi Bantuan Hukum.

13. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah (Bagian Perekonomian dan Kerjasama)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

14. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian dan Kerjasama)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.

15. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembanguan)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

16. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.

17. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Bagian Organisasi)
    Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta.

18. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan (Bagian Organisasi)
    Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota.

4.3. Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah				Indeks Kualitas Kebijakan Daerah		
		1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat			Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya kualitas kebijakan bina mental spiritual		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis bina mental	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terfasilitasinya kegiatan bina mental spiritual	Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan sosial	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Tersusunnya bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Tersusunnya bahan kebijakan penanganan stunting	Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Tersusunnya bahan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Tersusunnya bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan	Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	

				Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian			Indeks Perekonomian		
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian,	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Tersusunnya bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah	Persentase bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Persentase bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Tersusunnya bahan kebijakan kepariwisataan	Persentase bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Tersusunnya bahan kebijakan Pembiayaan Keuangan Usaha Mikro	Persentase bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Tersusunnya bahan kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Persentase bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD		1. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Tersusunnya bahan kebijakan BUMD	Persentase bahan kebijakan BUMD yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
				Tersusunnya bahan kebijakan BLUD	Persentase bahan kebijakan BLUD yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
					2. Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)		
				Terlaksananya pembinaan BUMD	Persentase BUMD yang dilakukan pembinaan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
				Terlaksananya pembinaan BUMD	Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
		3. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan			Indeks Pembangunan		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan		1. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Tersusunnya bahan kebijakan isu strategis	Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Tersusunnya bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan	Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					2. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		
				Tersusunnya bahan kebijakan pembangunan infrastruktur	Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan		Indeks tata kelola pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Tersusunnya bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Persentase pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	Persentase monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terlaksana	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
		4. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian		1. Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya bahan kebijakan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	Kegiatan Penataan Organisasi	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

					Terkelolanya Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola	Kegiatan Penataan Organisasi	
							Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Terkelolanya analisis jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Kegiatan Penataan Organisasi	
							Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Tersusunnya bahan kebijakan reformasi birokrasi	Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	Kegiatan Penataan Organisasi	
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Tersusunnya bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Kegiatan Penataan Organisasi	
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
						2. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
					Tersusunnya bahan kebijakan Budaya Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	
							Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	
					Tertatanya Kelembagaan Keistimewaan Kota Yogyakarta	Persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
							Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
					Tersusunnya bahan kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
							Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Tersusunnya bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
							Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Tersusunnya bahan kebijakan administrasi pemerintahan	Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
							Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
							1.Penataan Administrasi Pemerintahan 2.Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
					Tersusunnya bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
							Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

				Terlaksananya evaluasi kinerja kemantren dan kelurahan	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Terfasilitasinya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum		Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Terdokumentasikannya produk hukum	Persentase produk hukum yang didokumentasikan	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terlaksananya pembudayaan hukum masyarakat	Persentase sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terfasilitasinya bantuan hukum	Persentase bantuan hukum yang terfasiltasi	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
						Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terfasilitasinya rencana aksi nasional HAM	Nilai rencana aksi nasional HAM	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
						Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Meningkatnya peran kerjasama daerah dalam mendukung program pembangunan		Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Tersusunnya bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	
						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negri	
				Terfasilitasinya proses kerja sama daerah	Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum			Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya bahan kebijakan pelayanan publik	persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	Kegiatan Penataan Organisasi	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	persentase Pelayanan publik yang dipantau	Kegiatan Penataan Organisasi	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi umum		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya bahan kebijakan tatalaksana administasi umum	persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	Kegiatan Penataan Organisasi	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Meningkatnya kualitas layanan umum dan keprotokolan		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli	persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terfasilitasinya urusan kerumahtanggaan pimpinan dan Setda	persentase jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terfasilitasinya pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Fasilitasi Keprotokolan	
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
		6. Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif			Nilai RB Setda		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda		1. IKM Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					2. AKIP Setda		
					3. SPIP Setda		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	IP ASN Setda	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	IP ASN Setda	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir berikut ini:

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				56,918,467,056		51.007.716.988,00		52.048.756.116,00		53.373.534.953,00		54.828.483.972,00		56.720.442.127,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47,282,329,536		41.490.513.846,00		42.334.403.402,00		43.408.929.326,00		44.589.029.066,00		46.124.470.103,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	572,391,827	Optimum (4,741 - 5)	586.195.827,00	Optimum (4,742 - 5)	598.118.662,00	Optimum (4,743 - 5)	613.300.025,00	Optimum (4,744 - 5)	629.972.981,00	Optimum (4,745 - 5)	651.666.354,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	53,612,000.00	100%	49.706.000,00	100%	50.716.988,00	100%	52.004.277,00	100%	53.418.049,00	100%	55.257.520,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				47,456,000.00		44,954,000.00		45.868.335,00		47.032.558,00		48.311.169,00		49.974.783,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6 dokumen	47,456,000.00	6 dokumen	44.954.000,00	6 dokumen	45.868.335,00	6 dokumen	47.032.558,00	6 dokumen	48.311.169,00	6 dokumen	49.974.783,00		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				440,000.00		440.000,00		448.949,00		460.344,00		472.859,00		489.142,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	440,000.00	1 dokumen	440.000,00	1 dokumen	448.949,00	1 dokumen	460.344,00	1 dokumen	472.859,00	1 dokumen	489.142,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				440,000.00		440.000,00		448.949,00		460.344,00		472.859,00		489.142,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	440,000.00	1 dokumen	440.000,00	1 dokumen	448.949,00	1 dokumen	460.344,00	1 dokumen	472.859,00	1 dokumen	489.142,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				220,000.00		220.000,00		224.475,00		230.172,00		236.430,00		244.571,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	220,000.00	1 dokumen	220.000,00	1 dokumen	224.475,00	1 dokumen	230.172,00	1 dokumen	236.430,00	1 dokumen	244.571,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				220,000.00		220.000,00		224.475,00		230.172,00		236.430,00		244.571,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	220,000.00	1 dokumen	220.000,00	1 dokumen	224.475,00	1 dokumen	230.172,00	1 dokumen	236.430,00	1 dokumen	244.571,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,956,000.00		1.452.000,00		1.481.533,00		1.519.137,00		1.560.435,00		1.614.170,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8 laporan	1,956,000.00	8 laporan	1.452.000,00	8 laporan	1.481.533,00	8 laporan	1.519.137,00	8 laporan	1.560.435,00	8 laporan	1.614.170,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,880,000.00		1.980.000,00		2.020.272,00		2.071.550,00		2.127.867,00		2.201.141,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	2,880,000.00	6 laporan	1.980.000,00	6 laporan	2.020.272,00	6 laporan	2.071.550,00	6 laporan	2.127.867,00	6 laporan	2.201.141,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	'Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	160,115,000.00	5 nilai	148.444.000,00	5 nilai	151.463.253,00	5 nilai	155.307.673,00	5 nilai	159.529.811,00	5 nilai	165.023.283,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42,039,000.00		40.779.000,00		41.608.418,00		42.664.517,00		43.824.379,00		45.333.489,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	42,039,000.00	9 dokumen	40.779.000,00	9 dokumen	41.608.418,00	9 dokumen	42.664.517,00	9 dokumen	43.824.379,00	9 dokumen	45.333.489,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3,843,000.00		3.465.000,00		3.535.476,00		3.625.213,00		3.723.767,00		3.851.996,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3,843,000.00	3 dokumen	3.465.000,00	3 dokumen	3.535.476,00	3 dokumen	3.625.213,00	3 dokumen	3.723.767,00	3 dokumen	3.851.996,00		
4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				61,986,000.00		59.466.000,00		60.675.499,00		62.215.556,00		63.906.926,00		66.107.587,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	61,986,000.00	5 dokumen	59.466.000,00	5 dokumen	60.675.499,00	5 dokumen	62.215.556,00	5 dokumen	63.906.926,00	5 dokumen	66.107.587,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				966,000.00		462.000,00		471.397,00		483.362,00		496.502,00		513.599,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	966,000.00	1 laporan	462.000,00	1 laporan	471.397,00	1 laporan	483.362,00	1 laporan	496.502,00	1 laporan	513.599,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				966,000.00		462.000,00		471.397,00		483.362,00		496.502,00		513.599,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	966,000.00	1 dokumen	462.000,00	1 dokumen	471.397,00	1 dokumen	483.362,00	1 dokumen	496.502,00	1 dokumen	513.599,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				49,349,000.00		43.579.000,00		44.465.368,00		45.593.982,00		46.833.484,00		48.446.213,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	49,349,000.00	12 laporan	43.579.000,00	12 laporan	44.465.368,00	12 laporan	45.593.982,00	12 laporan	46.833.484,00	12 laporan	48.446.213,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				966,000.00		231.000,00		235.698,00		241.681,00		248.251,00		256.800,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	966,000.00	1 dokumen	231.000,00	1 dokumen	235.698,00	1 dokumen	241.681,00	1 dokumen	248.251,00	1 dokumen	256.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000.00		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	135,577,000.00	5 nilai	143.039.000,00	5 nilai	145.948.318,00	5 nilai	149.652.758,00	5 nilai	153.721.165,00	5 nilai	159.014.615,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1,380,000.00		660.000,00		673.424,00		690.517,00		709.289,00		733.714,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1,380,000.00	2 dokumen	660.000,00	2 dokumen	673.424,00	2 dokumen	690.517,00	2 dokumen	709.289,00	2 dokumen	733.714,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				920,000.00		440.000,00		448.949,00		460.344,00		472.859,00		489.142,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	920,000.00	1 laporan	440.000,00	1 laporan	448.949,00	1 laporan	460.344,00	1 laporan	472.859,00	1 laporan	489.142,00		
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5,280,000.00		3.630.000,00		3.703.832,00		3.797.842,00		3.901.089,00		4.035.424,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	5,280,000.00	12 laporan	3.630.000,00	12 laporan	3.703.832,00	12 laporan	3.797.842,00	12 laporan	3.901.089,00	12 laporan	4.035.424,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				127,307,000.00		137.979.000,00		140.785.401,00		144.358.797,00		148.283.284,00		153.389.478,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	127,307,000.00	4 laporan	137.979.000,00	4 laporan	140.785.401,00	4 laporan	144.358.797,00	4 laporan	148.283.284,00	4 laporan	153.389.478,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan				690,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Barang Milik Daerah SKPD																
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	690,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1 dokumen	366.857,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000.00		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	1,428,000.00	86,32 indeks	825.000,00	86,34 indeks	841.780,00	86,36 indeks	863.146,00	86,38 indeks	886.611,00	86,40 indeks	917.142,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1,428,000.00		825.000,00		841.780,00		863.146,00		886.611,00		917.142,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1,428,000.00	2 dokumen	825.000,00	2 dokumen	841.780,00	2 dokumen	863.146,00	2 dokumen	886.611,00	2 dokumen	917.142,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047.00		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	136,267,627.00	81,90 nilai	156.656.827,00	82,00 nilai	159,843,122.00	82,10 nilai	163.900.239,00	82,20 nilai	168.355.972,00	82,30 nilai	174.153.377,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7,483,350.00		7.483.350,00		7.635.556,00		7.829.361,00		8.042.207,00		8.319.144,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	7,483,350.00	1 paket	7.483.350,00	1 paket	7.635.556,00	1 paket	7.829.361,00	1 paket	8.042.207,00	1 paket	8.319.144,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26,038,305.00		29.737.505,00		30.342.346,00		31.112.491,00		31.958.304,00		33.058.801,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	4 paket	26,038,305.00	4 paket	29.737.505,00	4 paket	30.342.346,00	4 paket	31.112.491,00	4 paket	31.958.304,00	4 paket	33.058.801,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13,630,400.00		13.435.400,00		13.708.667,00		14.056.619,00		14.438.757,00		14.935.961,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	13,630,400.00	1 paket	13.435.400,00	1 paket	13.708.667,00	1 paket	14.056.619,00	1 paket	14.438.757,00	1 paket	14.935.961,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14,965,572.00		12.865.572,00		13.127.249,00		13.460.443,00		13.826.374,00		14.302.491,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	14,965,572.00	1 paket	12.865.572,00	1 paket	13.127.249,00	1 paket	13.460.443,00	1 paket	13.826.374,00	1 paket	14.302.491,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2,640,000.00		2.700.000,00		2.754.916,00		2.824.841,00		2.901.636,00		3.001.555,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 dokumen	2 dokumen	2,640,000.00	2 dokumen	2.700.000,00	2 dokumen	2.754.916,00	2 dokumen	2.824.841,00	2 dokumen	2.901.636,00	2 dokumen	3.001.555,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71,510,000.00		90.435.000,00		92.274.388,00		94.616.484,00		97.188.694,00		100.535.425,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	2 laporan	71,510,000.00	2 laporan	90.435.000,00	2 laporan	92.274.388,00	2 laporan	94.616.484,00	2 laporan	97.188.694,00	2 laporan	100.535.425,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150.00		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	8,137,000.00	5 nilai	5.000.000,00	5 nilai	5.101.697,00	5 nilai	5.231.187,00	5 nilai	5.373.400,00	5 nilai	5.558.436,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8,137,000.00		5.000.000,00		5.101.697,00		5.231.187,00		5.373.400,00		5.558.436,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	7 unit	8,137,000.00	4 unit	5.000.000,00	4 unit	5.101.697,00	4 unit	5.231.187,00	4 unit	5.373.400,00	4 unit	5.558.436,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000.00		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100%	100%	2,700,000.00	100%	2.700.000,00	100%	2.754.916,00	100%	2.824.841,00	100%	2.901.636,00	100%	3.001.556,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.530.509,00		1.569.356,00		1.612.020,00		1.667.531,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	1.500.000,00	2 laporan	1.500.000,00	2 laporan	1.530.509,00	2 laporan	1.569.356,00	2 laporan	1.612.020,00	2 laporan	1.667.531,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,200,000.00		1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1,200,000.00	1 laporan	1.200.000,00	1 laporan	1.224.407,00	1 laporan	1.255.485,00	1 laporan	1.289.616,00	1 laporan	1.334.025,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078.00		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	74,555,200.00	5 nilai	79.825.000,00	5 nilai	81.448.588,00	5 nilai	83.515.904,00	5 nilai	85.786.337,00	5 nilai	88.740.425,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26,940,000.00		24.240.000,00		24.733.026,00		25.360.796,00		26.050.245,00		26.947.296,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	26,940,000.00	1 unit	24.240.000,00	1 unit	24.733.026,00	1 unit	25.360.796,00	1 unit	26.050.245,00	1 unit	26.947.296,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22,485,200.00		30.535.000,00		31.156.062,00		31.946.860,00		32.815.356,00		33.945.366,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	4 unit	22,485,200.00	4 unit	30.535.000,00	4 unit	31.156.062,00	4 unit	31.946.860,00	4 unit	32.815.356,00	4 unit	33.945.366,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25,130,000.00		25.050.000,00		25.559.500,00		26.208.248,00		26.920.736,00		27.847.763,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	26 unit	25,130,000.00	26 unit	25.050.000,00	26 unit	25.559.500,00	26 unit	26.208.248,00	26 unit	26.920.736,00	26 unit	27.847.763,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	1 unit	-	1 unit	-	0	-	0	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda 1	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)	-	A (84,50 - 84,75)	-	A (84,75 - 85,00)	-	A (85,00 - 85,25)	-	A (85,00 - 85,25)	-		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	-	6 laporan	-	6 laporan	-	6 laporan	-	6 laporan	-	6 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Adpem)	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	273,394,725	Optimum (4,741 - 5)	211.182.647,00	Optimum (4,742 - 5)	215.477.959,00	Optimum (4,743 - 5)	220.947.193,00	Optimum (4,744 - 5)	226.953.788,00	Optimum (4,745 - 5)	234.769.030,00		
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	5,083,000.00	100%	2.574.000,00	100%	2.626.352,00	100%	2.693.015,00	100%	2.766.227,00	100%	2.861.482,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				782,000.00		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	782,000.00	1 dokumen	396.000,00	1 dokumen	404.054,00	1 dokumen	414.310,00	1 dokumen	425.573,00	1 dokumen	440.228,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,346,000.00		1.188.000,00		1.212.163,00		1.242.930,00		1.276.720,00		1.320.684,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	2,346,000.00	7 laporan	1.188.000,00	7 laporan	1.212.163,00	7 laporan	1.242.930,00	7 laporan	1.276.720,00	7 laporan	1.320.684,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				782,000.00		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	782,000.00	4 laporan	396.000,00	4 laporan	404.054,00	4 laporan	414.310,00	4 laporan	425.573,00	4 laporan	440.228,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	5,865,000.00	5 nilai	2.970.000,00	5 nilai	3.030.407,00	5 nilai	3.107.325,00	5 nilai	3.191.801,00	5 nilai	3.301.711,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	9 dokumen	391,000.00	9 dokumen	198.000,00	9 dokumen	202.027,00	9 dokumen	207.155,00	9 dokumen	212.787,00	9 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1 laporan	391,000.00	1 laporan	198.000,00	1 laporan	202.027,00	1 laporan	207.155,00	1 laporan	212.787,00	1 laporan	220.114,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4,301,000.00		2.178.000,00		2.222.299,00		2.278.705,00		2.340.653,00		2.421.255,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	4,301,000.00	12 laporan	2.178.000,00	12 laporan	2.222.299,00	12 laporan	2.278.705,00	12 laporan	2.340.653,00	12 laporan	2.421.255,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000.00		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,564,000.00	5 nilai	792.000,00	5 nilai	808.108,00	5 nilai	828.620,00	5 nilai	851.148,00	5 nilai	880.456,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	391,000.00	2 dokumen	198.000,00	2 dokumen	202.027,00	2 dokumen	207.155,00	2 dokumen	212.787,00	2 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	391,000.00	1 laporan	198.000,00	1 laporan	202.027,00	1 laporan	207.155,00	1 laporan	212.787,00	1 laporan	220.114,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	391,000.00	4 laporan	198.000,00	4 laporan	202.027,00	4 laporan	207.155,00	4 laporan	212.787,00	4 laporan	220.114,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	391,000.00	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000.00		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	391,000.00	86,32 indeks	198.000,00	86,34 indeks	202.027,00	86,36 indeks	207.155,00	86,38 indeks	212.787,00	86,40 indeks	220.114,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				391,000.00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	391,000.00	2 dokumen	198.000,00	2 dokumen	202.027,00	2 dokumen	207.155,00	2 dokumen	212.787,00	2 dokumen	220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047.00		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	114,400,225	81,90 nilai	90.771.647,00	82,00 nilai	92.617.882,00	82,10 nilai	94.968.696,00	82,20 nilai	97.550.481,00	82,30 nilai	100.909.672,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				1,500,000.00		1.500.000,00		1.530.509,00		1.569.356,00		1.612.020,00		1.667.531,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1,500,000.00	1 paket	1.500.000,00	1 paket	1.530.509,00	1 paket	1.569.356,00	1 paket	1.612.020,00	1 paket	1.667.531,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18,219,525.00		8.925.647,00		9.107.189,00		9.338.346,00		9.592.215,00		9.922.527,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	18,219,525.00	3 paket	8.925.647,00	3 paket	9.107.189,00	3 paket	9.338.346,00	3 paket	9.592.215,00	3 paket	9.922.527,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20,950,700.00		6.626.000,00		6.760.768,00		6.932.369,00		7.120.830,00		7.366.039,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	20,950,700.00	1 paket	6.626.000,00	1 paket	6.760.768,00	1 paket	6.932.369,00	1 paket	7.120.830,00	1 paket	7.366.039,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24,210,000.00		27.240.000,00		27.794.044,00		28.499.508,00		29.274.286,00		30.282.357,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	24,210,000.00	1 paket	27.240.000,00	1 paket	27.794.044,00	1 paket	28.499.508,00	1 paket	29.274.286,00	1 paket	30.282.357,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,200,000.00		1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	1,200,000.00	2 dokumen	1.200.000,00	2 dokumen	1.224.407,00	2 dokumen	1.255.485,00	2 dokumen	1.289.616,00	2 dokumen	1.334.025,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48,320,000.00		45.280.000,00		46.200.965,00		47.373.632,00		48.661.514,00		50.337.193,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	48,320,000.00	2 laporan	45.280.000,00	2 laporan	46.200.965,00	2 laporan	47.373.632,00	2 laporan	48.661.514,00	2 laporan	50.337.193,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150.00		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	46,482,000.00	5 nilai	9.276.000,00	5 nilai	9.464.668,00	5 nilai	9.704.899,00	5 nilai	9.968.732,00	5 nilai	10.312.010,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46,482,000.00		9.276.000,00		9.464.668,00		9.704.899,00		9.968.732,00		10.312.010,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	46,482,000.00	1 unit	9.276.000,00	1 unit	9.464.668,00	1 unit	9.704.899,00	1 unit	9.968.732,00	1 unit	10.312.010,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000.00		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100%	100%	36,712,000.00	100%	38.716.000,00	100%	39.503.458,00	100%	40.506.129,00	100%	41.607.314,00	100%	43.040.079,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35,512,000.00		37.516.000,00		38.279.051,00		39.250.644,00		40.317.698,00		41.706.054,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	35,512,000.00	2 laporan	37.516.000,00	2 laporan	38.279.051,00	2 laporan	39.250.644,00	2 laporan	40.317.698,00	2 laporan	41.706.054,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,200,000.00		1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1,200,000.00	1 laporan	1.200.000,00	1 laporan	1.224.407,00	1 laporan	1.255.485,00	1 laporan	1.289.616,00	1 laporan	1.334.025,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078.00		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	62,897,500.00	5 nilai	65.885.000,00	5 nilai	67.225.057,00	5 nilai	68.931.354,00	5 nilai	70.805.298,00	5 nilai	73.243.506,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24,533,500.00		25.530.000,00		26.049.263,00		26.710.442,00		27.436.583,00		28.381.372,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	1 unit	24,533,500.00	1 unit	25.530.000,00	1 unit	26.049.263,00	1 unit	26.710.442,00	1 unit	27.436.583,00	1 unit	28.381.372,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30,604,000.00		30.695.000,00		31.319.316,00		32.114.258,00		32.987.305,00		34.123.236,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	5 unit	30,604,000.00	5 unit	30.695.000,00	5 unit	31.319.316,00	5 unit	32.114.258,00	5 unit	32.987.305,00	5 unit	34.123.236,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7,760,000.00		9.660.000,00		9.856.478,00		10.106.654,00		10.381.410,00		10.738.898,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	7,760,000.00	10 unit	9.660.000,00	10 unit	9.856.478,00	10 unit	10.106.654,00	10 unit	10.381.410,00	10 unit	10.738.898,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Adpem 1)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	-	Baik (85,10 - 88,30)	-	Baik (85,20 - 88,30)	-	Baik (85,30 - 88,30)	-	Baik (85,40 - 88,30)	-	Baik (85,50 - 88,30)	-		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sekretariat Daerah															
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	SKPD															
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Bagor)	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)	787,004,162	A (84,47 - 84,50)	391.772.762,00	A (84,50 - 84,75)	399.741.164,00	A (84,75 - 85,00)	409.887.332,00	A (85,00 - 85,25)	421.030.384,00	A (85,25 - 85,50)	435.528.739,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	8,648,000.00	100%	5.060.000,00	100%	5.162.917,00	100%	5.293.960,00	100%	5.437.880,00	100%	5.625.137,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan				1,564,000.00		1.012.000,00		1.032.583,00		1.058.792,00		1.087.576,00		1.125.027,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1,564,000.00	1 dokumen	1.012.000,00	1 dokumen	1.032.583,00	1 dokumen	1.058.792,00	1 dokumen	1.087.576,00	1 dokumen	1.125.027,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,058,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1,058,000.00	1 dokumen	506.000,00	1 dokumen	516.292,00	1 dokumen	529.396,00	1 dokumen	543.788,00	1 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,058,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1,058,000.00	1 dokumen	506.000,00	1 dokumen	516.292,00	1 dokumen	529.396,00	1 dokumen	543.788,00	1 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1,058,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1,058,000.00	1 dokumen	506.000,00	1 dokumen	516.292,00	1 dokumen	529.396,00	1 dokumen	543.788,00	1 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,346,000.00		1.518.000,00		1.548.875,00		1.588.188,00		1.631.364,00		1.687.541,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	2,346,000.00	7 laporan	1.518.000,00	7 laporan	1.548.875,00	7 laporan	1.588.188,00	7 laporan	1.631.364,00	7 laporan	1.687.541,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,564,000.00		1.012.000,00		1.032.583,00		1.058.792,00		1.087.576,00		1.125.027,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	1,564,000.00	4 laporan	1.012.000,00	4 laporan	1.032.583,00	4 laporan	1.058.792,00	4 laporan	1.087.576,00	4 laporan	1.125.027,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	44,592,000.00	5 nilai	42.660.000,00	5 nilai	43.527.677,00	5 nilai	44.632.489,00	5 nilai	45.845.852,00	5 nilai	47.424.574,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				39,624,000.00		39.624.000,00		40.429.926,00		41.456.113,00		42.583.124,00		44.049.491,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	39,624,000.00	9 dokumen	39.624.000,00	9 dokumen	40.429.926,00	9 dokumen	41.456.113,00	9 dokumen	42.583.124,00	9 dokumen	44.049.491,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	782,000.00	3 dokumen	506.000,00	3 dokumen	516.292,00	3 dokumen	529.396,00	3 dokumen	543.788,00	3 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,058,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1,058,000.00	1 laporan	506.000,00	1 laporan	516.292,00	1 laporan	529.396,00	1 laporan	543.788,00	1 laporan	562.514,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 laporan	1 laporan	782,000.00	1 laporan	506.000,00	1 laporan	516.292,00	1 laporan	529.396,00	1 laporan	543.788,00	1 laporan	562.514,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,564,000.00		1.012.000,00		1.032.583,00		1.058.792,00		1.087.576,00		1.125.027,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	1,564,000.00	12 laporan	1.012.000,00	12 laporan	1.032.583,00	12 laporan	1.058.792,00	12 laporan	1.087.576,00	12 laporan	1.125.027,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	782,000.00	1 dokumen	506.000,00	1 dokumen	516.292,00	1 dokumen	529.396,00	1 dokumen	543.788,00	1 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000.00		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	3,128,000.00	5 nilai	2.024.000,00	5 nilai	2.065.168,00	5 nilai	2.117.584,00	5 nilai	2.175.152,00	5 nilai	2.250.056,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	782,000.00	2 dokumen	506.000,00	2 dokumen	516.292,00	2 dokumen	529.396,00	2 dokumen	543.788,00	2 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	782,000.00	1 laporan	506.000,00	1 laporan	516.292,00	1 laporan	529.396,00	1 laporan	543.788,00	1 laporan	562.514,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	782,000.00	4 laporan	506.000,00	4 laporan	516.292,00	4 laporan	529.396,00	4 laporan	543.788,00	4 laporan	562.514,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	782,000.00	1 dokumen	506.000,00	1 dokumen	516.292,00	1 dokumen	529.396,00	1 dokumen	543.788,00	1 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000.00		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai		86,28 indeks	86,30 indeks	782,000.00	86,32 indeks	506.000,00	86,34 indeks	516.292,00	86,36 indeks	529.396,00	86,38 indeks	543.788,00	86,40 indeks	562.514,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Nilai IP ASN Setda															
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				782,000.00		506.000,00		516.292,00		529.396,00		543.788,00		562.514,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	1 dokumen	782,000.00	2 dokumen	506.000,00	2 dokumen	516.292,00	2 dokumen	529.396,00	2 dokumen	543.788,00	2 dokumen	562.514,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047.00		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	111,324,962.00	81,90 nilai	147.545.562,00	82,00 nilai	150.546.542,00	82,10 nilai	154.367.692,00	82,20 nilai	158.564.278,00	82,30 nilai	164.024.501,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3,001,000.00		4.714.000,00		4.809.880,00		4.931.963,00		5.066.042,00		5.240.493,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,001,000.00	1 paket	4.714.000,00	1 paket	4.809.880,00	1 paket	4.931.963,00	1 paket	5.066.042,00	1 paket	5.240.493,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29,457,740.00		38.892.840,00		39.683.895,00		40.691.146,00		41.797.361,00		43.236.670,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	3 paket	29,457,740.00	3 paket	38.892.840,00	3 paket	39.683.895,00	3 paket	40.691.146,00	3 paket	41.797.361,00	3 paket	43.236.670,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7,751,050.00		9.010.550,00		9.193.819,00		9.427.175,00		9.683.459,00		10.016.912,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	7,751,050.00	1 paket	9.010.550,00	1 paket	9.193.819,00	1 paket	9.427.175,00	1 paket	9.683.459,00	1 paket	10.016.912,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11,649,172.00		11.739.172,00		11.977.939,00		12.281.961,00		12.615.854,00		13.050.286,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	11,649,172.00	2 paket	11.739.172,00	2 paket	11.977.939,00	2 paket	12.281.961,00	2 paket	12.615.854,00	2 paket	13.050.286,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59,466,000.00		83.189.000,00		84.881.009,00		87.035.447,00		89.401.562,00		92.480.140,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	59,466,000.00	2 laporan	83.189.000,00	2 laporan	84.881.009,00	2 laporan	87.035.447,00	2 laporan	89.401.562,00	2 laporan	92.480.140,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150.00		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	52,950,000.00	5 nilai	14.000.000,00	5 nilai	14.284.751,00	5 nilai	14,647,324.00	5 nilai	15.045.521,00	5 nilai	15.563.620,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52,950,000.00		14.000.000,00		14.284.751,00		14.647.324,00		15.045.521,00		15.563.620,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	5 unit	52,950,000.00	2 unit	14.000.000,00	2 unit	14.284.751,00	2 unit	14.647.324,00	2 unit	15.045.521,00	2 unit	15.563.620,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000.00		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan	100%	100%	2,704,000.00	100%	2.740.000,00	100%	2.795.730,00	100%	2.866.690,00	100%	2.944.623,00	100%	3.046.023,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				664,000.00		700.000,00		714.238,00		732.366,00		752.276,00		778.181,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	664,000.00	2 laporan	700.000,00	2 laporan	714.238,00	2 laporan	732.366,00	2 laporan	752.276,00	2 laporan	778.181,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2,040,000.00		2.040.000,00		2.081.492,00		2.134.324,00		2.192.347,00		2.267.842,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2,040,000.00	1 laporan	2.040.000,00	1 laporan	2.081.492,00	1 laporan	2.134.324,00	1 laporan	2.192.347,00	1 laporan	2.267.842,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078.00		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	73,737,200.00	5 nilai	177.237.200,00	5 nilai	180.842.087,00	5 nilai	185.432.197,00	5 nilai	190.473.290,00	5 nilai	197.032.314,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18,970,000.00		16.470.000,00		16.804.989,00		17.231.531,00		17.699.981,00		18.309.487,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	18,970,000.00	1 unit	16.470.000,00	1 unit	16.804.989,00	1 unit	17.231.531,00	1 unit	17.699.981,00	1 unit	18.309.487,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19,067,200.00		19.067.200,00		19.455.014,00		19.948.819,00		20.491.140,00		21.196.761,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	4 unit	19,067,200.00	4 unit	19.067.200,00	4 unit	19.455.014,00	4 unit	19.948.819,00	4 unit	20.491.140,00	4 unit	21.196.761,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8,700,000.00		8.700.000,00		8.876.952,00		9.102.266,00		9.349.717,00		9.671.678,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	24 unit	8,700,000.00	24 unit	8.700.000,00	24 unit	8.876.952,00	24 unit	9.102.266,00	24 unit	9.349.717,00	24 unit	9.671.678,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27,000,000.00		133.000.000,00		135.705.132,00		139.149.581,00		142.932.452,00		147.854.388,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	1 unit	27,000,000.00	1 unit	133.000.000,00	1 unit	135.705.132,00	1 unit	139.149.581,00	1 unit	142.932.452,00	1 unit	147.854.388,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Bagor 1)	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Perangkat Daerah																
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (BPBJ)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	983,179,855	Baik (85,10 - 88,30)	765.062.625,00	Baik (85,20 - 88,30)	780.623.490,00	Baik (85,30 - 88,30)	800.437.169,00	Baik (85,40 - 88,30)	822.197.568,00	Baik (85,50 - 88,30)	850.510.273,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	6,870,000	100%	4.950.000,00	100%	5.050.680,00	100%	5.178.877,00	100%	5.319.668,00	100%	5.502.851,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				675,000.00		495.000,00		505.068,00		517.888,00		531.967,00		550.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	675,000.00	1 dokumen	495.000,00	1 dokumen	505.068,00	1 dokumen	517.888,00	1 dokumen	531.967,00	1 dokumen	550.285,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				675,000.00		495.000,00		505.068,00		517.888,00		531.967,00		550.285,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	675,000.00	1 dokumen	495.000,00	1 dokumen	505.068,00	1 dokumen	517.888,00	1 dokumen	531.967,00	1 dokumen	550.285,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				675,000.00		495.000,00		505.068,00		517.888,00		531.967,00		550.285,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	675,000.00	1 dokumen	495.000,00	1 dokumen	505.068,00	1 dokumen	517.888,00	1 dokumen	531.967,00	1 dokumen	550.285,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				675,000.00		495.000,00		505.068,00		517.888,00		531.967,00		550.285,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	675,000.00	1 dokumen	495.000,00	1 dokumen	505.068,00	1 dokumen	517.888,00	1 dokumen	531.967,00	1 dokumen	550.285,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,370,000.00		1.650.000,00		1.683.560,00		1.726.292,00		1.773.222,00		1.834.284,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	2,370,000.00	7 laporan	1.650.000,00	7 laporan	1.683.560,00	7 laporan	1.726.292,00	7 laporan	1.773.222,00	7 laporan	1.834.284,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,800,000.00		1.320.000,00		1.346.848,00		1.381.033,00		1.418.578,00		1.467.427,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	1,800,000.00	4 laporan	1.320.000,00	4 laporan	1.346.848,00	4 laporan	1.381.033,00	4 laporan	1.418.578,00	4 laporan	1.467.427,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	54,294,000	5 nilai	52.482.000,00	5 nilai	53.549.449,00	5 nilai	54.908.633,00	5 nilai	56.401.359,00	5 nilai	58.343.565,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				720,000.00		528.000,00		538.739,00		552.413,00		567.431,00		586.971,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	720,000.00	9 dokumen	528.000,00	9 dokumen	538.739,00	9 dokumen	552.413,00	9 dokumen	567.431,00	9 dokumen	586.971,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	510,000.00	1 laporan	330.000,00	1 laporan	336.712,00	1 laporan	345.258,00	1 laporan	354.644,00	1 laporan	366.857,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2,370,000.00		1.650.000,00		1.683.560,00		1.726.292,00		1.773.222,00		1.834.284,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 laporan	1 laporan	2,370,000.00	1 laporan	1.650.000,00	1 laporan	1.683.560,00	1 laporan	1.726.292,00	1 laporan	1.773.222,00	1 laporan	1.834.284,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50,184,000.00		49.644.000,00		50.653.726,00		51.939.412,00		53.351.418,00		55.188.596,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	50,184,000.00	12 laporan	49.644.000,00	12 laporan	50.653.726,00	12 laporan	51.939.412,00	12 laporan	53.351.418,00	12	55.188.596,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	510,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1 dokumen	366.857,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000.00		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	2,040,000	5 nilai	1.320.000,00	5 nilai	1.346.848,00	5 nilai	1.381.032,00	5 nilai	1.418.576,00	5 nilai	1.467.428,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	510,000.00	2 dokumen	330.000,00	2 dokumen	336.712,00	2 dokumen	345.258,00	2 dokumen	354.644,00	2 dokumen	366.857,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	510,000.00	1 laporan	330.000,00	1 laporan	336.712,00	1 laporan	345.258,00	1 laporan	354.644,00	1 laporan	366.857,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	510,000.00	4 laporan	330.000,00	4 laporan	336.712,00	4 laporan	345.258,00	4 laporan	354.644,00	4 laporan	366.857,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				510,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	510,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1 dokumen	366.857,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000.00		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai		86,28 indeks	86,30 indeks	680,000.00	86,32 indeks	440.000,00	86,34 indeks	448.949,00	86,36 indeks	460.344,00	86,38 indeks	472.859,00	86,40 indeks	489.142,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Nilai IP ASN Setda															
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				680,000.00		440.000,00		448.949,00		460.344,00		472.859,00		489.142,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	680,000.00	2 dokumen	440.000,00	2 dokumen	448.949,00	2 dokumen	460.344,00	2 dokumen	472.859,00	2 dokumen	489.142,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047.00		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	257,295,105.00	81,90 nilai	208.857.195,00	82,00 nilai	213.105.212,00	82,10 nilai	218.514.219,00	82,20 nilai	224.454.669,00	82,30 nilai	232.183.855,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3,718,700.00		5.980.700,00		6.102.343,00		6.257.232,00		6.427.339,00		6.648.667,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,718,700.00	1 paket	5.980.700,00	1 paket	6.102.343,00	1 paket	6.257.232,00	1 paket	6.427.339,00	1 paket	6.648.667,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				109,123,905.00		47.233.995,00		48.194.703,00		49.417.974,00		50.761.434,00		52.509.424,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	109,123,905.00	3 paket	47.233.995,00	3 paket	48.194.703,00	3 paket	49.417.974,00	3 paket	50.761.434,00	3 paket	52.509.424,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8,925,000.00		40.790.000,00		41.619.642,00		42.676.026,00		43.836.201,00		45.345.718,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8,925,000.00	2 paket	40.790.000,00	2 paket	41.619.642,00	2 paket	42.676.026,00	2 paket	43.836.201,00	2 paket	45.345.718,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5,487,500.00		5.487.500,00		5.599.112,00		5.741.228,00		5.897.307,00		6.100.383,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 paket	2 paket	5,487,500.00	2 paket	5.487.500,00	2 paket	5.599.112,00	2 paket	5.741.228,00	2 paket	5.897.307,00	2 paket	6.100.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Disediakan															
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,300,000.00		3.300.000,00		3.367.120,00		3.452.584,00		3.546.444,00		3.668.568,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	3,300,000.00	1 dokumen	3.300.000,00	1 dokumen	3.367.120,00	1 dokumen	3.452.584,00	1 dokumen	3.546.444,00	1 dokumen	3.668.568,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				126,740,000.00		106.065.000,00		108.222.292,00		110.969.175,00		113.985.944,00		117.911.095,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	126,740,000.00	2 laporan	106.065.000,00	2 laporan	108.222.292,00	2 laporan	110.969.175,00	2 laporan	113.985.944,00	2 laporan	117.911.095,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150.00		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	347,226,150.00	5 nilai	37.000.000,00	5 nilai	37.752.555,00	5 nilai	38.710.786,00	5 nilai	39.763.163,00	5 nilai	41.132.424,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				347,226,150.00		37.000.000,00		37.752.555,00		38.710.786,00		39.763.163,00		41.132.424,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 unit	41 unit	347,226,150.00	10 unit	37.000.000,00	10 unit	37.752.555,00	10 unit	38.710.786,00	10 unit	39.763.163,00	10 unit	41.132.424,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000.00		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100%	100%	169,750,000.00	100%	191.930.000,00	100%	195.833.728,00	100%	200.804.354,00	100%	206.263.349,00	100%	213.366.110,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,750,000.00		1.250.000,00		1.275.424,00		1.307.797,00		1.343.350,00		1.389.609,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	1,750,000.00	2 laporan	1.250.000,00	2 laporan	1.275.424,00	2 laporan	1.307.797,00	2 laporan	1.343.350,00	2 laporan	1.389.609,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2,400,000.00		2.400.000,00		2.448.814,00		2.510.970,00		2.579.232,00		2.668.049,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	2 laporan	2,400,000.00	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	2.448.814,00	1 laporan	2.510.970,00	1 laporan	2.579.232,00	1 laporan	2.668.049,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165,600,000.00		188.280.000,00		192.109.490,00		196.985.587,00		202.340.767,00		209.308.452,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	165,600,000.00	2 laporan	188.280.000,00	2 laporan	192.109.490,00	2 laporan	196.985.587,00	2 laporan	202.340.767,00	2 laporan	209.308.452,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078.00		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	145,024,600.00	5 nilai	268.083.430,00	5 nilai	273.536.069,00	5 nilai	280.478.924,00	5 nilai	288.103.925,00	5 nilai	298.024.898,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52,471,500.00		24.298.000,00		24.792.205,00		25.421.478,00		26.112.577,00		27.011.774,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	1 unit	52,471,500.00	1 unit	24.298.000,00	1 unit	24.792.205,00	1 unit	25.421.478,00	1 unit	26.112.577,00	1 unit	27.011.774,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9,676,500.00		35.408.830,00		36.129.022,00		37.046.044,00		38.053.165,00		39.363.540,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	5 unit	9,676,500.00	5 unit	35.408.830,00	5 unit	36.129.022,00	5 unit	37.046.044,00	5 unit	38.053.165,00	5 unit	39.363.540,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15,876,600.00		15.876.600,00		16.199.520,00		16.610.693,00		17.062.266,00		17.649.812,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	21 unit	15,876,600.00	10 unit	15.876.600,00	10 unit	16.199.520,00	10 unit	16.610.693,00	10 unit	17.062.266,00	10 unit	17.649.812,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				67,000,000.00		192.500.000,00		196.415.322,00		201.400.709,00		206.875.917,00		213.999.772,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bangunan Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	67,000,000.00	1 unit	192.500.000,00	1 unit	196.415.322,00	1 unit	201.400.709,00	1 unit	206.875.917,00	1 unit	213.999.772,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (BPBJ 1)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	-	Baik (85,10 - 88,30)	-	Baik (85,20 - 88,30)	-	Baik (85,30 - 88,30)	-	Baik (85,40 - 88,30)	-	Baik (85,50 - 88,30)	-		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	4 laporan		4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Gaji)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	27,592,637,000.00	Baik (85,10 - 88,30)	25,965,384,000.00	Baik (85,20 - 88,30)	26.493.502.704,00	Baik (85,30 - 88,30)	27.165.957.093,00	Baik (85,40 - 88,30)	27.904.481.158,00	Baik (85,50 - 88,30)	28.865.383.119,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24,958,985,000.00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	26,268,947,000.00	5 nilai	24.640.659.000,00	5 nilai	25.141.833.675,00	5 nilai	25.779.980.190,00	5 nilai	26.480.825.578,00	5 nilai	27.392.703.391,00		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26,268,947,000.00		24.640.659.000,00		25.141.833.675,00		25.779.980.190,00		26.480.825.578,00		27.392.703.391,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ bulan	156 orang Orang/ bulan	26,268,947,000.00	148 orang Orang/ bulan	24.640.659.000,00	148 orang Orang/ bulan	25.141.833.675,00	148 orang Orang/ bulan	25.779.980.190,00	148 orang Orang/ bulan	26.480.825.578,00	148 orang Orang/ bulan	27.392.703.391,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,474,090,000.00		1.535.125.000,00		1.566.348.426,00		1.606.105.263,00		1.649.768.271,00		1.706.578.700,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,323,690,000	5 nilai	1.324.725.000,00	5 nilai	1.351.669.029,00	5 nilai	1.385.976.903,00	5 nilai	1.423.655.580,00	5 nilai	1.472.679.728,00		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				139,690,000.00		165.725.000,00		169.095.737,00		173.387.701,00		178.101.358,00		184.234.349,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	139,690,000.00	2 Orang/ bulan	165.725.000,00	2 Orang/ bulan	169.095.737,00	2 Orang/ bulan	173.387.701,00	2 Orang/ bulan	178.101.358,00	2 Orang/ bulan	184.234.349,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,184,000,000.00		1.159.000.000,00		1.182.573.292,00		1.212.589.202,00		1.245.554.222,00		1.288.445.379,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan	1,184,000,000.00	21 Orang/ bulan	1.159.000.000,00	21 Orang/ bulan	1.182.573.292,00	21 Orang/ bulan	1.212.589.202,00	21 Orang/ bulan	1.245.554.222,00	21 Orang/ bulan	1.288.445.379,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Hukum)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	535,014,920	Baik (85,10 - 88,30)	816.771.920,00	Baik (85,20 - 88,30)	833.384.520,00	Baik (85,30 - 88,30)	854.537.364,00	Baik (85,40 - 88,30)	877.768.516,00	Baik (85,50 - 88,30)	907.994.827,00		
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	4,140,000.00	100%	3.135.000,00	100%	3.198.764,00	100%	3.279.953,00	100%	3.369.121,00	100%	3.485.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Sekretariat Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				276,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1	366.857,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				276,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1	366.857,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				276,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1	366.857,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				276,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	330.000,00	1 dokumen	336.712,00	1 dokumen	345.258,00	1 dokumen	354.644,00	1	366.857,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,208,000.00		1.320.000,00		1.346.848,00		1.381.033,00		1.418.578,00		1.467.427,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	2,208,000.00	7 laporan	1.320.000,00	7 laporan	1.346.848,00	7 laporan	1.381.033,00	7 laporan	1.418.578,00	7 laporan	1.467.427,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				828,000.00		495.000,00		505.068,00		517.888,00		531.967,00		550.285,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	828,000.00	4 laporan	495.000,00	4 laporan	505.068,00	4 laporan	517.888,00	4 laporan	531.967,00	4 laporan	550.285,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000.00		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	58260000	5 nilai	58.311.000,00	5 nilai	59.497.007,00	5 nilai	61.007.152,00	5 nilai	62.665.670,00	5 nilai	64.823.587,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57,156,000.00		57.156.000,00		58.318.515,00		59.798.748,00		61.424.415,00		63.539.589,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	57,156,000.00	9 dokumen	57.156.000,00	9 dokumen	58.318.515,00	9 dokumen	59.798.748,00	9 dokumen	61.424.415,00	9 dokumen	63.539.589,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	165.000,00	1 dokumen	168.356,00	1 dokumen	172.629,00	1 dokumen	177.322,00	1 dokumen	183.428,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	165.000,00	1 dokumen	168.356,00	1 dokumen	172.629,00	1 dokumen	177.322,00	1 dokumen	183.428,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				276,000.00		660.000,00		673.424,00		690.517,00		709.289,00		733.714,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	276,000.00	12 laporan	660.000,00	12 laporan	673.424,00	12 laporan	690.517,00	12 laporan	709.289,00	12 laporan	733.714,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	165.000,00	1 dokumen	168.356,00	1 dokumen	172.629,00	1 dokumen	177.322,00	1 dokumen	183.428,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000.00		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,380,000.00	5 nilai	825.000,00	5 nilai	841.780,00	5 nilai	863.145,00	5 nilai	886.610,00	5 nilai	917.141,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				552,000.00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.644,00		366.857,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	552,000.00	2 dokumen	330.000,00	2 dokumen	336.712,00	2 dokumen	345.258,00	2 dokumen	354.644,00	2 dokumen	366.857,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
SKPD																
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	276,000.00	1 laporan	165.000,00	1 laporan	168.356,00	1 laporan	172.629,00	1 laporan	177.322,00	1 laporan	183.428,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	276,000.00	4 laporan	165.000,00	4 laporan	168.356,00	4 laporan	172.629,00	4 laporan	177.322,00	4 laporan	183.428,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				276,000.00		165.000,00		168.356,00		172.629,00		177.322,00		183.428,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000.00	1 dokumen	165.000,00	1 dokumen	168.356,00	1 dokumen	172.629,00	1 dokumen	177.322,00	1 dokumen	183.428,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000.00		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	552,000.00	86,32 indeks	528.000,00	86,34 indeks	538.739,00	86,36 indeks	552.413,00	86,38 indeks	567.431,00	86,40 indeks	586,971.00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				552,000.00		528.000,00		538.739,00		552.413,00		567.431,00		586.971,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	552,000.00	2 dokumen	528.000,00	2 dokumen	538.739,00	2 dokumen	552.413,00	2 dokumen	567.431,00	2 dokumen	586.971,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047.00		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	331,992,142.00	81,90 nilai	509.971.142,00	82,00 nilai	520.343.617,00	82,10 nilai	533.550.905,00	82,20 nilai	548.055.832,00	82,30 nilai	566.928.353,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5,557,000.00		6.440.000,00		6.570.985,00		6.737.769,00		6.920.940,00		7.159.265,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5,557,000.00	1 paket	6.440.000,00	1 paket	6.570.985,00	1 paket	6.737.769,00	1 paket	6.920.940,00	1 paket	7.159.265,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18,006,042.00		23.252.042,00		23.724.973,00		24.327.157,00		24.988.507,00		25.848.996,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	18,006,042.00	4 paket	23.252.042,00	4 paket	23.724.973,00	4 paket	24.327.157,00	4 paket	24.988.507,00	4 paket	25.848.996,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14,509,100.00		11.829.100,00		12.069.696,00		12.376.047,00		12.712.498,00		13.150.258,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	14,509,100.00	1 paket	11.829.100,00	1 paket	12.069.696,00	1 paket	12.376.047,00	1 paket	12.712.498,00	1 paket	13.150.258,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15,440,000.00		16.850.000,00		17.192.718,00		17.629.101,00		18.108.359,00		18.731.928,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	15,440,000.00	2 paket	16.850.000,00	2 paket	17.192.718,00	2 paket	17.629.101,00	2 paket	18.108.359,00	2 paket	18.731.928,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7,880,000.00		8.900.000,00		9.081.020,00		9.311.513,00		9.564.653,00		9.894.015,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	7,880,000.00	2 dokumen	8.900.000,00	2 dokumen	9.081.020,00	2 dokumen	9.311.513,00	2 dokumen	9.564.653,00	2 dokumen	9.894.015,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270,600,000.00		442.700.000,00		451.704.225,00		463.169.318,00		475.760.875,00		492.143.891,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 laporan	33 laporan	270,600,000.00	2 laporan	442.700.000,00	2 laporan	451.704.225,00	2 laporan	463.169.318,00	2 laporan	475.760.875,00	2 laporan	492.143.891,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150.00		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai		5 nilai	95.266.000,00	5 nilai	97.203.648,00	5 nilai	99.670.856,00	5 nilai	102.380.474,00	5 nilai	105.905.986,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		43.266.000,00		44.146.002,00		45.266.509,00		46.497.109,00		48.098.255,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	29 unit	43.266.000,00	0	44.146.002,00	0	45.266.509,00	29 unit	46.497.109,00	0	48.098.255,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		52.000.000,00		53.057.646,00		54.404.347,00		55.883.365,00		57.807.731,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	4 unit	52.000.000,00	4 unit	53.057.646,00	0	54.404.347,00	0	55.883.365,00	8 unit	57.807.731,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000.00		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100%	100%	59,400,000.00	100%	67.200.000,00	100%	68.566.803,00	100%	70.307.156,00	100%	72.218.502,00	100%	74.705.375,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,000,000.00		3.000.000,00		3.061.018,00		3.138.712,00		3.224.040,00		3.335.061,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	3,000,000.00	2 laporan	3.000.000,00	2 laporan	3.061.018,00	2 laporan	3.138.712,00	2 laporan	3.224.040,00	2 laporan	3.335.061,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,200,000.00		1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1,200,000.00	1 laporan	1.200.000,00	1 laporan	1.224.407,00	1 laporan	1.255.485,00	1 laporan	1.289.616,00	1 laporan	1.334.025,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				55,200,000.00		63.000.000,00		64.281.378,00		65.912.959,00		67.704.846,00		70.036.289,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	55,200,000.00	1 laporan	63.000.000,00	1 laporan	64.281.378,00	1 laporan	65.912.959,00	1 laporan	67.704.846,00	1 laporan	70.036.289,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078.00		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	79,290,778.00	5 nilai	81.535.778,00	5 nilai	83.194.162,00	5 nilai	85.305.784,00	5 nilai	87.624.876,00	5 nilai	90.642.274,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24,955,000.00		23.740.000,00		24.222.856,00		24.837.677,00		25.512.905,00		26.391.452,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	7 unit	24,955,000.00	1 unit	23.740.000,00	1 unit	24.222.856,00	1 unit	24.837.677,00	1 unit	25.512.905,00	1 unit	26.391.452,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41,425,778.00		42.595.778,00		43.462.148,00		44.565.298,00		45.776.834,00		47.353.178,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	6 unit	41,425,778.00	6 unit	42.595.778,00	6 unit	43.462.148,00	6 unit	44.565.298,00	6 unit	45.776.834,00	6 unit	47.353.178,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12,910,000.00		15.200.000,00		15.509.158,00		15.902.809,00		16.335.137,00		16.897.644,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	51 unit	12,910,000.00	50 unit	15.200.000,00	50 unit	15.509.158,00	50 unit	15.902.809,00	50 unit	16.335.137,00	50 unit	16.897.644,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	-	0	-	1 unit	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Hukum 1)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	-	Baik (85,10 - 88,30)	-	Baik (85,20 - 88,30)	-	Baik (85,30 - 88,30)	-	Baik (85,40 - 88,30)	-	Baik (85,50 - 88,30)	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 -		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Kesra)	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 -	128,813,150.00	A	144.049.750,00	A	146.979.627,00	A	150.710.245,00	A	154.807.398,00	A	160.138.257,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum		Optimum		Optimum		Optimum		Optimum			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000.00		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	3,220,000.00	100%	1.540.000,00	100%	1.571.322,00	100%	1.611.207,00	100%	1.655.008,00	100%	1.711.999,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,288,000		616.000,00		628.529,00		644.482,00		662.003,00		684.799,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	1 laporan	1,288,000	7 laporan	616.000,00	7 laporan	628.529,00	7 laporan	644.482,00	7 laporan	662.003,00	7 laporan	684.799,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				644,000		308.000,00		314.265,00		322.241,00		331.001,00		342.400,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1 laporan	644,000	4 laporan	308.000,00	4 laporan	314.265,00	4 laporan	322.241,00	4 laporan	331.001,00	4 laporan	342.400,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	5,152,000	5 nilai	2.618.000,00	5 nilai	2.671.248,00	5 nilai	2.739.051,00	5 nilai	2.813.513,00	5 nilai	2.910.398,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				322,000		308.000,00		314.265,00		322.241,00		331.001,00		342.400,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	322,000	9 dokumen	308.000,00	9 dokumen	314.265,00	9 dokumen	322.241,00	9 dokumen	331.001,00	9 dokumen	342.400,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	322,000	1 laporan	154.000,00	1 laporan	157.132,00	1 laporan	161.121,00	1 laporan	165.501,00	1 laporan	171.200,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3,864,000		1.848.000,00		1.885.587,00		1.933.447,00		1.986.009,00		2.054.398,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3,864,000	12 laporan	1.848.000,00	12 laporan	1.885.587,00	12 laporan	1.933.447,00	12 laporan	1.986.009,00	12 laporan	2.054.398,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	38,378,000	5 nilai	39.674.000,00	5 nilai	40.480.943,00	5 nilai	41.508.425,00	5 nilai	42.636.858,00	5 nilai	44.105.076,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				644,000		308.000,00		314.265,00		322.241,00		331.001,00		342.400,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	644,000	2 dokumen	308.000,00	2 dokumen	314.265,00	2 dokumen	322.241,00	2 dokumen	331.001,00	2 dokumen	342.400,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	322,000	1 laporan	154.000,00	1 laporan	157.132,00	1 laporan	161.121,00	1 laporan	165.501,00	1 laporan	171.200,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				37,090,000		39.058.000,00		39.852.414,00		40.863.942,00		41.974.855,00		43.420.276,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	12 laporan	37,090,000	4 laporan	39.058.000,00	4 laporan	39.852.414,00	4 laporan	40.863.942,00	4 laporan	41.974.855,00	4 laporan	43.420.276,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan				322,000		154.000,00		157.132,00		161.121,00		165.501,00		171.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Barang Milik Daerah SKPD																
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	322,000	1 dokumen	154.000,00	1 dokumen	157.132,00	1 dokumen	161.121,00	1 dokumen	165.501,00	1 dokumen	171.200,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	644,000	86,32 indeks	308.000,00	86,34 indeks	314.265,00	86,36 indeks	322.241,00	86,38 indeks	331.001,00	86,40 indeks	342.400,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				644,000		308.000,00		314.265,00		322.241,00		331.001,00		342.400,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	644,000	2 dokumen	308.000,00	2 dokumen	314.265,00	2 dokumen	322.241,00	2 dokumen	331.001,00	2 dokumen	342.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	48,712,150	81,90 nilai	52.702.250,00	82,00 nilai	53.774.179,00	82,10 nilai	55.139.066,00	82,20 nilai	56.638.058,00	82,30 nilai	58.588.413,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,102,000		1.682.000,00		1.716.211,00		1.759.771,00		1.807.612,00		1.869.858,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1,102,000	1 paket	1.682.000,00	1 paket	1.716.211,00	1 paket	1.759.771,00	1 paket	1.807.612,00	1 paket	1.869.858,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10,425,750		11.205.600,00		11.433.514,00		11.723.718,00		12.042.435,00		12.457.121,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	10,425,750	3 paket	11.205.600,00	3 paket	11.433.514,00	3 paket	11.723.718,00	3 paket	12.042.435,00	3 paket	12.457.121,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4,744,400		4.434.900,00		4.525.103,00		4.639.958,00		4.766.099,00		4.930.221,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	4,744,400	1 paket	4.434.900,00	1 paket	4.525.103,00	1 paket	4.639.958,00	1 paket	4.766.099,00	1 paket	4.930.221,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11,500,000		19.007.750,00		19.394.355,00		19.886.620,00		20.427.250,00		21.130.671,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2 paket	11,500,000	2 paket	19.007.750,00	2 paket	19.394.355,00	2 paket	19.886.620,00	2 paket	20.427.250,00	2 paket	21.130.671,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				900,000		-		-		-		-		-		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	900,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20,040,000		16.372.000,00		16.704.996,00		17.128.999,00		17.594.662,00		18.200.542,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 laporan	2 laporan	20,040,000	2 laporan	16.372.000,00	2 laporan	16.704.996,00	2 laporan	17.128.999,00	2 laporan	17.594.662,00	2 laporan	18.200.542,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai		5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	16 unit		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,500,000	5 nilai	3.200.000,00	5 nilai	3.265.086,00	5 nilai	3.347.960,00	5 nilai	3.438.976,00	5 nilai	3.557.399,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000		2.000.000,00		2.040.679,00		2.092.475,00		2.149.360,00		2.223.374,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1 laporan	1,500,000	2 laporan	2.000.000,00	2 laporan	2.040.679,00	2 laporan	2.092.475,00	2 laporan	2.149.360,00	2 laporan	2.223.374,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1.200.000,00	1 laporan	1.224.407,00	1 laporan	1.255.485,00	1 laporan	1.289.616,00	1 laporan	1.334.025,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	31,207,000	5 nilai	44.007.500,00	5 nilai	44.902.584,00	5 nilai	46.042.295,00	5 nilai	47.293.984,00	5 nilai	48.922.572,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14,306,000		22.850.000,00		23.314.754,00		23.906.526,00		24.556.440,00		25.402.051,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	1 unit	14,306,000	1 unit	22.850.000,00	1 unit	23.314.754,00	1 unit	23.906.526,00	1 unit	24.556.440,00	1 unit	25.402.051,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9,161,000		10.717.500,00		10.935.487,00		11.213.050,00		11.517.884,00		11.914.507,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	3 unit	9,161,000	3 unit	10.717.500,00	3 unit	10.935.487,00	3 unit	11.213.050,00	3 unit	11.517.884,00	3 unit	11.914.507,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7,740,000		10.440.000,00		10.652.343,00		10.922.719,00		11.219.660,00		11.606.014,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	8 unit	7,740,000	8 unit	10.440.000,00	8 unit	10.652.343,00	8 unit	10.922.719,00	8 unit	11.219.660,00	8 unit	11.606.014,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Kesra 1)	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	-	Optimum (4,741 - 5)	-	Optimum (4,742 - 5)	-	Optimum (4,743 - 5)	-	Optimum (4,744 - 5)	-	Optimum (4,745 - 5)	-		
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	1 laporan		7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1 laporan		4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (PKD)	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	414,902,611	Optimum (4,741 - 5)	460.973.685,00	Optimum (4,742 - 5)	470.349.586,00	Optimum (4,743 - 5)	482.287.927,00	Optimum (4,744 - 5)	495.399.237,00	Optimum (4,745 - 5)	512.458.513,00		
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	1,904,000	100%	2.016.000,00	100%	2.057.005,00	100%	2.109.213,00	100%	2.166.554,00	100%	2.241.162,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan				272,000		176.000,00		179.580,00		184.138,00		189.144,00		195.657,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	176.000,00	1 dokumen	179.580,00	1 dokumen	184.138,00	1 dokumen	189.144,00	1 dokumen	195.657,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8 aporan	272,000	7 laporan	368.000,00	7 laporan	375.485,00	7 laporan	385.015,00	7 laporan	395.482,00	7 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4 laporan	272,000	4 laporan	368.000,00	4 laporan	375.485,00	4 laporan	385.015,00	4 laporan	395.482,00	4 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,360,000	5 nilai	1.840.000,00	5 nilai	1.877.425,00	5 nilai	1.925.075,00	5 nilai	1.977.410,00	5 nilai	2.045.505,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	8 dokumen	272,000	9 dokumen	368.000,00	9 dokumen	375.485,00	9 dokumen	385.015,00	9 dokumen	395.482,00	9 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	272,000	1 laporan	368.000,00	1 laporan	375.485,00	1 laporan	385.015,00	1 laporan	395.482,00	1 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	24 laporan	272,000	12 laporan	368.000,00	12 laporan	375.485,00	12 laporan	385.015,00	12 laporan	395.482,00	12 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,088,000	5 nilai	1.472.000,00	5 nilai	1.501.940,00	5 nilai	1.540.060,00	5 nilai	1.581.928,00	5 nilai	1.636.404,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	272,000	2 dokumen	368.000,00	2 dokumen	375.485,00	2 dokumen	385.015,00	2 dokumen	395.482,00	2 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	272,000	1 laporan	368.000,00	1 laporan	375.485,00	1 laporan	385.015,00	1 laporan	395.482,00	1 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	272,000	4 laporan	368.000,00	4 laporan	375.485,00	4 laporan	385.015,00	4 laporan	395.482,00	4 laporan	409.101,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				272,000		368.000,00		375.485,00		385.015,00		395.482,00		409.101,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	272,000	1 dokumen	368.000,00	1 dokumen	375.485,00	1 dokumen	385.015,00	1 dokumen	395.482,00	1 dokumen	409.101,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	1,224,000	86,32 indeks	828.000,00	86,34 indeks	844.841,00	86,36 indeks	866.285,00	86,38 indeks	889.835,00	86,40 indeks	920.477,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1,224,000		828.000,00		844.841,00		866.285,00		889.835,00		920.477,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1,224,000	2 dokumen	828.000,00	2 dokumen	844.841,00	2 dokumen	866.285,00	2 dokumen	889.835,00	2 dokumen	920.477,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	124,710,111	81,90 nilai	160.930.685,00	82,00 nilai	164.203.908,00	82,10 nilai	168.371.709,00	82,20 nilai	172.949.003,00	82,30 nilai	178.904.571,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				770,000		1.225.000,00		1.249.916,00		1.281.641,00		1.316.483,00		1.361.817,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	770,000	1 paket	1.225.000,00	1 paket	1.249.916,00	1 paket	1.281.641,00	1 paket	1.316.483,00	1 paket	1.361.817,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15,648,611		30.243.085,00		30.858.209,00		31.641.448,00		32.501.641,00		33.620.848,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	3 paket	15,648,611	4 paket	30.243.085,00	4 paket	30.858.209,00	4 paket	31.641.448,00	4 paket	32.501.641,00	4 paket	33.620.848,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6,581,000		9.842.500,00		10.042.690,00		10.297.592,00		10.577.539,00		10.941.781,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	6,581,000	1 paket	9.842.500,00	1 paket	10.042.690,00	1 paket	10.297.592,00	1 paket	10.577.539,00	1 paket	10.941.781,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27,942,500		30.552.100,00		31.173.509,00		31.964.751,00		32.833.734,00		33.964.376,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4 paket	27,942,500	3 paket	30.552.100,00	3 paket	31.173.509,00	3 paket	31.964.751,00	3 paket	32.833.734,00	3 paket	33.964.376,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,000,000		3.000.000,00		3.061.018,00		3.138.712,00		3.224.040,00		3.335.061,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.061.018,00	1 dokumen	3.138.712,00	1 dokumen	3.224.040,00	1 dokumen	3.335.061,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70,768,000		86.068.000,00		87.818.566,00		90.047.565,00		92.495.566,00		95.680.688,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	70,768,000	2 laporan	86.068.000,00	2 laporan	87.818.566,00	2 laporan	90.047.565,00	2 laporan	92.495.566,00	2 laporan	95.680.688,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	46,500,000	5 nilai	6.000.000,00	5 nilai	6.122.036,00	5 nilai	6.277.425,00	5 nilai	6.448.081,00	5 nilai	6.670.123,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	7 unit		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46,500,000		6.000.000,00		6.122.036,00		6.277.425,00		6.448.081,00		6.670.123,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	7 unit	46,500,000	2 unit	6.000.000,00	2 unit	6.122.036,00	2 unit	6.277.425,00	2 unit	6.448.081,00	2 unit	6.670.123,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100%	100%	154,924,000	100%	162.514.500,00	100%	165.819.937,00	100%	170.028.756,00	100%	174.651.097,00	100%	180.665.277,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				45,124,000		46.594.500,00		47.542.201,00		48.748.911,00		50.074.181,00		51.798.506,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	14 laporan	45,124,000	2 laporan	46.594.500,00	2 laporan	47.542.201,00	2 laporan	48.748.911,00	2 laporan	50.074.181,00	2 laporan	51.798.506,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,800,000		1.920.000,00		1.959.052,00		2.008.776,00		2.063.386,00		2.134.439,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	1,800,000	1 laporan	1.920.000,00	1 laporan	1.959.052,00	1 laporan	2.008.776,00	1 laporan	2.063.386,00	1 laporan	2.134.439,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108,000,000		114.000.000,00		116.318.684,00		119.271.069,00		122.513.530,00		126.732.332,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	12 laporan	108,000,000	12 laporan	114.000.000,00	12 laporan	116.318.684,00	12 laporan	119.271.069,00	12 laporan	122.513.530,00	12 laporan	126.732.332,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	83,192,500	5 nilai	125.372.500,00	5 nilai	127.922.494,00	5 nilai	131.169.404,00	5 nilai	134.735.329,00	5 nilai	139.374.994,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24,150,000		26.940.000,00		27.487.942,00		28.185.637,00		28.951.882,00		29.948.851,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	2 unit	24,150,000	1 unit	26.940.000,00	1 unit	27.487.942,00	1 unit	28.185.637,00	1 unit	28.951.882,00	1 unit	29.948.851,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30,972,500		33.562.500,00		34.245.139,00		35.114.344,00		36.068.950,00		37.310.999,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	3 unit	30,972,500	4 unit	33.562.500,00	4 unit	34.245.139,00	4 unit	35.114.344,00	4 unit	36.068.950,00	4 unit	37.310.999,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,070,000		14.870.000,00		15.172.446,00		15.557.551,00		15.980.493,00		16.530.788,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	37 unit	20,070,000	25 unit	14.870.000,00	25 unit	15.172.446,00	25 unit	15.557.551,00	25 unit	15.980.493,00	25 unit	16.530.788,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8,000,000		50.000.000,00		51.016.967,00		52.311.872,00		53.734.004,00		55.584.356,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	8,000,000	1 unit	50.000.000,00	1 unit	51.016.967,00	0	52.311.872,00	0	53.734.004,00	0	55.584.356,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (PKD 1)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)	-	Baik (85,20 - 88,30)	-	Baik (85,30 - 88,30)	-	Baik (85,40 - 88,30)	-	Baik (85,50 - 88,30)	-		
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8 laporan		7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4 laporan		4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Tapem)	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	277,599,025	Baik (85,10 - 88,30)	246.765.980,00	Baik (85,20 - 88,30)	251.785.033,00	Baik (85,30 - 88,30)	258.175.808,00	Baik (85,40 - 88,30)	265.194.486,00	Baik (85,50 - 88,30)	274.326.563,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	2,208,000	100%	1.584.000,00	100%	1.616.216,00	100%	1.657.240,00	100%	1.702.294,00	100%	1.760.912,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				552,000		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	7 laporan	552,000	7 laporan	396.000,00	7 laporan	404.054,00	7 laporan	414.310,00	7 laporan	425.573,00	7 laporan	440.228,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				552,000		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	552,000	4 laporan	396.000,00	4 laporan	404.054,00	4 laporan	414.310,00	4 laporan	425.573,00	4 laporan	440.228,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	2,070,000	5 nilai	1.386.000,00	5 nilai	1.414.189,00	5 nilai	1.450.085,00	5 nilai	1.489.507,00	5 nilai	1.540.798,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				690,000		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	690,000	9 dokumen	396.000,00	9 dokumen	404.054,00	9 dokumen	414.310,00	9 dokumen	425.573,00	9 dokumen	440.228,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	276,000	1 laporan	198.000,00	1 laporan	202.027,00	1 laporan	207.155,00	1 laporan	212.787,00	1 laporan	220.114,00		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				552,000		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	552,000	12 laporan	396.000,00	12 laporan	404.054,00	12 laporan	414.310,00	12 laporan	425.573,00	12 laporan	440.228,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	1,380,000	5 nilai	990.000,00	5 nilai	1.010.135,00	5 nilai	1.035.775,00	5 nilai	1.063.934,00	5 nilai	1.100.570,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				552,000		396.000,00		404.054,00		414.310,00		425.573,00		440.228,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	552,000	2 dokumen	396.000,00	2 dokumen	404.054,00	2 dokumen	414.310,00	2 dokumen	425.573,00	2 dokumen	440.228,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	276,000	1 laporan	198.000,00	1 laporan	202.027,00	1 laporan	207.155,00	1 laporan	212.787,00	1 laporan	220.114,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	276,000	4 laporan	198.000,00	4 laporan	202.027,00	4 laporan	207.155,00	4 laporan	212.787,00	4 laporan	220.114,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				276,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	276,000	1 dokumen	198.000,00	1 dokumen	202.027,00	1 dokumen	207.155,00	1 dokumen	212.787,00	1 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	345,000	86,32 indeks	198.000,00	86,34 indeks	202.027,00	86,36 indeks	207.155,00	86,38 indeks	212.787,00	86,40 indeks	220.114,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				345,000		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.114,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	345,000	2 dokumen	198.000,00	2 dokumen	202.027,00	2 dokumen	207.155,00	2 dokumen	212.787,00	2 dokumen	220.114,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,74 nilai	81,80 nilai	142,748,725	81,90 nilai	177.425.580,00	82,00 nilai	181.034.299,00	82,10 nilai	185.629.286,00	82,20 nilai	190.675.737,00	82,30 nilai	197.241.733,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,845,000		2.595.000,00		2.647.781,00		2.714.986,00		2.788.795,00		2.884.828,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1,845,000	1 paket	2.595.000,00	1 paket	2.647.781,00	1 paket	2.714.986,00	1 paket	2.788.795,00	1 paket	2.884.828,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70,179,275		112.739.830,00		115.032.883,00		117.952.632,00		121.159.250,00		125.331.418,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	4 paket	70,179,275	4 paket	112.739.830,00	4 paket	115.032.883,00	4 paket	117.952.632,00	4 paket	121.159.250,00	4 paket	125.331.418,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9,707,500		10.392.000,00		10.603.366,00		10.872.500,00		11.168.075,00		11.552.653,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	9,707,500	1 paket	10.392.000,00	1 paket	10.603.366,00	1 paket	10.872.500,00	1 paket	11.168.075,00	1 paket	11.552.653,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24,136,950		23.918.750,00		24.405.242,00		25.024.692,00		25.705.004,00		26.590.166,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	24,136,950	2 paket	23.918.750,00	2 paket	24.405.242,00	2 paket	25.024.692,00	2 paket	25.705.004,00	2 paket	26.590.166,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,760,000		3.000.000,00		3.061.018,00		3.138.712,00		3.224.040,00		3.335.061,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1,760,000	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.061.018,00	1 dokumen	3.138.712,00	1 dokumen	3.224.040,00	1 dokumen	3.335.061,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35,120,000		24.780.000,00		25.284.009,00		25.925.764,00		26.630.573,00		27.547.607,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	35,120,000	2 laporan	24.780.000,00	2 laporan	25.284.009,00	2 laporan	25.925.764,00	2 laporan	26.630.573,00	2 laporan	27.547.607,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563,995,150		166.542.000,00		169.929.355,00		174.242.477,00		178.979.371,00		185.142.599,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	62,700,000	5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-	5 nilai	-		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62,700,000		-		-		-		-		-		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9 unit	62,700,000	0	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan	100%	100%	2,200,000	100%	2.200.000,00	100%	2.244.746,00	100%	2.301.722,00	100%	2.364.296,00	100%	2.445.712,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,000,000		1.000.000,00		1.020.339,00		1.046.237,00		1.074.680,00		1.111.687,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	1,000,000	2 laporan	1.000.000,00	2 laporan	1.020.339,00	2 laporan	1.046.237,00	2 laporan	1.074.680,00	2 laporan	1.111.687,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,200,000		1.200.000,00		1.224.407,00		1.255.485,00		1.289.616,00		1.334.025,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1,200,000	1 laporan	1.200.000,00	1 laporan	1.224.407,00	1 laporan	1.255.485,00	1 laporan	1.289.616,00	1 laporan	1.334.025,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	63,947,300	5 nilai	62.982.400,00	5 nilai	64.263.421,00	5 nilai	65.894.545,00	5 nilai	67.685.931,00	5 nilai	70.016.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26,640,000		23.939.900,00		24.426.822,00		25.046.820,00		25.727.734,00		26.613.679,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	26,640,000	1 unit	23.939.900,00	1 unit	24.426.822,00	1 unit	25.046.820,00	1 unit	25.727.734,00	1 unit	26.613.679,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29,427,300		31.162.500,00		31.796.325,00		32.603.374,00		33.489.718,00		34.642.950,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	4 unit	29,427,300	4 unit	31.162.500,00	4 unit	31.796.325,00	4 unit	32.603.374,00	4 unit	33.489.718,00	4 unit	34.642.950,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7,880,000		7.880.000,00		8.040.274,00		8.244.351,00		8.468.479,00		8.760.095,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	12 unit	7,880,000	13 unit	7.880.000,00	13 unit	8.040.274,00	13 unit	8.244.351,00	13 unit	8.468.479,00	13 unit	8.760.095,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Tapem 1)	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)	-	Optimum (4,742 - 5)	-	Optimum (4,743 - 5)	-	Optimum (4,744 - 5)	-	Optimum (4,745 - 5)	-		
	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	7 laporan		7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan		4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Umpro)	Nilai AKIP Setda (predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)	2,196,575,000	A (84,47 - 84,50)	2.279.511.400,00 #VALUE!	A (84,50 - 84,75)	2.325.875.149,00	A (84,75 - 85,00)	2.384.910.195,00	A (85,00 - 85,25)	2.449.745.512,00	A (85,25 - 85,50)	2.534.103.477,00		
	Nilai SPIP Setda (predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	2,196,575,000	Optimum (4,741 - 5)		Optimum (4,742 - 5)		Optimum (4,743 - 5)		Optimum (4,744 - 5)		Optimum (4,745 - 5)			
	Nilai IKM Setda (nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%	6,845,000	100%	7.220.000,00	100%	7.366.849,00	100%	7.553.835,00	100%	7.759.192,00	100%	8.026.381,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				345,000		345.000,00		352.017,00		360.952,00		370.765,00		383.532,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	345,000	1 dokumen	345.000,00	1 dokumen	352.017,00	1 dokumen	360.952,00	1 dokumen	370.765,00	1 dokumen	383.532,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				345,000		345.000,00		352.017,00		360.952,00		370.765,00		383.532,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	345,000	1 dokumen	345.000,00	1 dokumen	352.017,00	1 dokumen	360.952,00	1 dokumen	370.765,00	1 dokumen	383.532,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				345,000		345.000,00		352.017,00		360.952,00		370.765,00		383.532,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	345,000	1 dokumen	345.000,00	1 dokumen	352.017,00	1 dokumen	360.952,00	1 dokumen	370.765,00	1 dokumen	383.532,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				345,000		345.000,00		352.017,00		360.952,00		370.765,00		383.532,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	345,000	1 dokumen	345.000,00	1 dokumen	352.017,00	1 dokumen	360.952,00	1 dokumen	370.765,00	1 dokumen	383.532,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4,085,000		4.460.000,00		4.550.713,00		4.666.219,00		4.793.073,00		4.958.125,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	7 laporan	7 laporan	4,085,000	7 laporan	4.460.000,00	7 laporan	4.550.713,00	7 laporan	4.666.219,00	7 laporan	4.793.073,00	7 laporan	4.958.125,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,380,000		1.380.000,00		1.408.068,00		1.443.808,00		1.483.059,00		1.534.128,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	1,380,000	4 laporan	1.380.000,00	4 laporan	1.408.068,00	4 laporan	1.443.808,00	4 laporan	1.483.059,00	4 laporan	1.534.128,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26,608,270,000		24.958.985.000,00		25.466.634.213,00		26.113.024.772,00		26.822.924.189,00		27.746.582.310,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	7,615,000	5 nilai	7.615.000,00	5 nilai	7.769.883,00	5 nilai	7.967.099,00	5 nilai	8.183.688,00	5 nilai	8.465.498,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2,715,000		2.715.000,00		2.770.221,00		2.840.535,00		2.917.756,00		3.018.231,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	2,715,000	9 dokumen	2.715.000,00	9 dokumen	2.770.221,00	9 dokumen	2.840.535,00	9 dokumen	2.917.756,00	9 dokumen	3.018.231,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				460,000		460.000,00		469.356,00		481.269,00		494.353,00		511.376,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	460,000	3 dokumen	460.000,00	3 dokumen	469.356,00	3 dokumen	481.269,00	3 dokumen	494.353,00	3 dokumen	511.376,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				690,000		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	690,000	1 laporan	690.000,00	1 laporan	704.034,00	1 laporan	721.904,00	1 laporan	741.529,00	1 laporan	767.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				690,000		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	690,000	1 dokumen	690.000,00	1 dokumen	704.034,00	1 dokumen	721.904,00	1 dokumen	741.529,00	1 dokumen	767.064,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2,715,000		2.715.000,00		2.770.221,00		2.840.535,00		2.917.756,00		3.018.231,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	2,715,000	12 laporan	2.715.000,00	12 laporan	2.770.221,00	12 laporan	2.840.535,00	12 laporan	2.917.756,00	12 laporan	3.018.231,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				345,000		345.000,00		352.017,00		360.952,00		370.765,00		383.532,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	345,000	1 laporan	345.000,00	1 laporan	352.017,00	1 laporan	360.952,00	1 laporan	370.765,00	1 laporan	383.532,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				187,985,000		193.586.000,00		197.523.410,00		202.536.919,00		208.043.017,00		215.207.066,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	3,450,000	5 nilai	3.450.000,00	5 nilai	3.520.170,00	5 nilai	3.609.520,00	5 nilai	3.707.646,00	5 nilai	3.835.320,00		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1,380,000		1.380.000,00		1.408.068,00		1.443.808,00		1.483.059,00		1.534.128,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1,380,000	2 dokumen	1.380.000,00	2 dokumen	1.408.068,00	2 dokumen	1.443.808,00	2 dokumen	1.483.059,00	2 dokumen	1.534.128,00		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				690,000		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	690,000	1 laporan	690.000,00	1 laporan	704.034,00	1 laporan	721.904,00	1 laporan	741.529,00	1	767.064,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				690,000		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	690,000	4 laporan	690.000,00	4 laporan	704.034,00	4 laporan	721.904,00	4 laporan	741.529,00	4 laporan	767.064,00		
4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				690,000		690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	690,000	1 dokumen	690.000,00	1 dokumen	704.034,00	1 dokumen	721.904,00	1 dokumen	741.529,00	1 dokumen	767.064,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,736,000		44.521.000,00		45.426.527,00		46.579.537,00		47.845.832,00		49.493.423,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,28 indeks	86,30 indeks	40,690,000	86,32 indeks	40.690.000,00	86,34 indeks	41.517.607,00	86,36 indeks	42.571.402,00	86,38 indeks	43.728.733,00	86,40 indeks	45.234.549,00		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						40.000.000,00		40.813.573,00		41.849.498,00		42.987.204,00		44.467.485,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	40,000,000	1 paket	40.000.000,00	1 paket	40.813.573,00	1 paket	41.849.498,00	1 paket	42.987.204,00	1 paket	44.467.485,00		
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						690.000,00		704.034,00		721.904,00		741.529,00		767.064,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	690,000	2 dokumen	690.000,00	2 dokumen	704.034,00	2 dokumen	721.904,00	2 dokumen	741.529,00	2 dokumen	767.064,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,358,583,047		2.581.549.788,00		2.634.056.800,00		2.700.914.060,00		2.774.340.151,00		2.869.875.664,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum	81,74 nilai	81,80 nilai	1,091,132,000	81,90 nilai	1.076.688.900,00	82,00 nilai	1.098.588.039,00	82,10 nilai	1.126.472.248,00	82,20 nilai	1.157.096.121,00	82,30 nilai	1.196.941.189,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				630,549,500		532.386.400,00		543.214.787,00		557.002.589,00		572.145.063,00		591.847.107,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	630,549,500	5 paket	532.386.400,00	5 paket	543.214.787,00	5 paket	557.002.589,00	5 paket	572.145.063,00	5 paket	591.847.107,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				77,692,500		58.792.500,00		59.988.300,00		61.510.915,00		63.183.129,00		65.358.865,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	77,692,500	3 paket	58.792.500,00	3 paket	59.988.300,00	3 paket	61.510.915,00	3 paket	63.183.129,00	3 paket	65.358.865,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				77,692,500		57.240.000,00		58.404.224,00		59.886.632,00		61.514.688,00		63.632.971,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	77,692,500	2 dokumen	57.240.000,00	2 dokumen	58.404.224,00	2 dokumen	59.886.632,00	2 dokumen	61.514.688,00	2 dokumen	63.632.971,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340,770,000		428.270.000,00		436.980.728,00		448.072.112,00		460.253.241,00		476.102.246,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	340,770,000	2 laporan	428.270.000,00	2 laporan	436.980.728,00	2 laporan	448.072.112,00	2 laporan	460.253.241,00	2 laporan	476.102.246,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan		2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-		-		-		-		-		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,485,295,078		1.838.376.308,00		1.875.767.666,00		1.923.378.138,00		1.975.666.411,00		2.043.699.275,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	871,443,000	5 nilai	933.447.500,00	5 nilai	952.433.204,00	5 nilai	976.607.731,00	5 nilai	1.003.157.441,00	5 nilai	1.037.701.568,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				419,590,000		351.220.000,00		358.363.582,00		367.459.517,00		377.449.140,00		390.446.752,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	10 unit	419,590,000	10 unit	351.220.000,00	10 unit	358.363.582,00	10 unit	367.459.517,00	10 unit	377.449.140,00	10 unit	390.446.752,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				430,153,000		562.327.500,00		573.764.869,00		588.328.089,00		604.322.167,00		625.132.242,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	24 unit	430,153,000	27 unit	562.327.500,00	27 unit	573.764.869,00	27 unit	588.328.089,00	27 unit	604.322.167,00	27 unit	625.132.242,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan				21,700,000		19.900.000,00		20.304.753,00		20.820.125,00		21.386.134,00		22.122.574,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Peralatan dan Mesin Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	79 unit	21,700,000	54 unit	19.900.000,00	54 unit	20.304.753,00	54 unit	20.820.125,00	54 unit	21.386.134,00	54 unit	22.122.574,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,474,090,000		1.535.125.000,00		1.566.348.426,00		1.606.105.263,00		1.649.768.271,00		1.706.578.700,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 nilai	5 nilai	175,400,000	5 nilai	210.400.000,00	5 nilai	214.679.397,00	5 nilai	220.128.360,00	5 nilai	226.112.691,00	5 nilai	233.898.972,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				144,000,000		144.000.000,00		146.928.865,00		150.658.193,00		154.753.933,00		160.082.946,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0	1 paket	144,000,000	1 paket	144.000.000,00	1 paket	146.928.865,00	1 paket	150.658.193,00	1 paket	154.753.933,00	1 paket	160.082.946,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6,400,000		6.400.000,00		6.530.172,00		6.695.920,00		6.877.953,00		7.114.798,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	4 orang	6,400,000	4 orang	6.400.000,00	4 orang	6.530.172,00	4 orang	6.695.920,00	4 orang	6.877.953,00	4 orang	7.114.798,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25,000,000		60.000.000,00		61.220.360,00		62.774.247,00		64.480.805,00		66.701.228,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	2 orang	25,000,000	2 orang	60.000.000,00	2 orang	61.220.360,00	2 orang	62.774.247,00	2 orang	64.480.805,00	2 orang	66.701.228,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda (Umpro 1)	Nilai SPIP Setda (Predikat)	Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)		Optimum (4,741 - 5)	-	Optimum (4,742 - 5)	-	Optimum (4,743 - 5)	-	Optimum (4,744 - 5)	-	Optimum (4,745 - 5)	-		
	Nilai AKIP Setda (Predikat)	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)		A (84,47 - 84,50)		A (84,50 - 84,75)		A (84,75 - 85,00)		A (85,00 - 85,25)		A (85,25 - 85,50)			
	Nilai IKM Setda (Nilai)	Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)		Baik (85,10 - 88,30)		Baik (85,20 - 88,30)		Baik (85,30 - 88,30)		Baik (85,40 - 88,30)		Baik (85,50 - 88,30)			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				92,530,000		77.785.000,00		79.367.093,00		81.381.577,00		83.593.993,00		86.472.584,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Perangkat Daerah																
Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-		-		-		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan			7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-	7 laporan	-		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan			4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan administasi umum	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Tersusunnya bahan kebijakan tatalaksana administasi umum	persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	2 laporan		2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (Predikat)	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 - 52)	141,026,000	sangat tinggi (51,2 - 52,1)	179.538.000,00	sangat tinggi (51,3 - 52,2)	183.189.684,00	sangat tinggi (51,4 - 52,3)	187.839.379,00	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	192.945.914,00	sangat tinggi (51,6 - 52,5)	199.590.083,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Tersusunnya bahan kebijakan reformasi birokrasi	Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	-	100%	141,026,000	100%	179.538.000,00	100%	183.189.684,00	100%	187.839.379,00	100%	192.945.914,00	100%	199.590.083,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				141,026,000		179.538.000,00		183.189.684,00		187.839.379,00		192.945.914,00		199.590.083,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 dokumen	1 dokumen	141,026,000	2 dokumen	179.538.000,00	2 dokumen	183.189.684,00	2 dokumen	187.839.379,00	2 dokumen	192.945.914,00	2 dokumen	199.590.083,00		
Tersusunnya bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 dokumen	1 dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 1	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (Predikat)	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 -	206,740,000	sangat tinggi (51,2 - 52,1)	128.220.000,00	sangat tinggi (51,3 - 52,2)	130.827.910,00	sangat tinggi (51,4 - 52,3)	134.148.566,00	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	137.795.481,00	sangat tinggi (51,6 - 52,5)	142.540.523,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Terkelolanya Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola	-	100%	206,740,000	100%	128.220.000,00	100%	130.827.910,00	100%	134.148.566,00	100%	137.795.481,00	100%	142.540.523,00		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				206,740,000		128.220.000,00		130.827.910,00		134.148.566,00		137.795.481,00		142.540.523,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 dokumen	2 dokumen	206,740,000	2 dokumen	128.220.000,00	2 dokumen	130.827.910,00	2 dokumen	134.148.566,00	2 dokumen	137.795.481,00	2 dokumen	142.540.523,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 2	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (Predikat)	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 -		sangat tinggi (51,2 - 52,1)	-	sangat tinggi (51,3 - 52,2)	-	sangat tinggi (51,4 - 52,3)	-	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	-	sangat tinggi (51,6 - 52,5)	-		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Terkelolanya analisis jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 3	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (Predikat)	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 - 52)	110,252,000	sangat tinggi (51,2 - 52,1)	142.506.000,00	sangat tinggi (51,3 - 52,2)	145.404.478,00	sangat tinggi (51,4 - 52,3)	149.095.114,00	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	153.148.361,00	sangat tinggi (51,6 - 52,5)	158.422.086,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Tersusunnya bahan kebijakan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	-	100%	110,252,000	100%	142.506.000,00	100%	145.404.478,00	100%	149.095.114,00	100%	153.148.361,00	100%	158.422.086,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				110,252,000		142.506.000,00		145.404.478,00		149.095.114,00		153.148.361,00		158.422.086,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 dokumen	2 dokumen	110,252,000	2 dokumen	142.506.000,00	2 dokumen	145.404.478,00	2 dokumen	149.095.114,00	2 dokumen	153.148.361,00	2 dokumen	158.422.086,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pelayanan publik	persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik 1	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				489,138,000		450.264.000,00		459.422.072,00		471.083.059,00		483.889.756,00		500.552.692,00		
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	persentase Pelayanan publik yang dipantau	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas layanan umum dan keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan (nilai)	81,53 (Baik)	81,60 (Baik)	13,545,817,261	81,70 (Baik)	#VALUE!	81,80 (Baik)	9.359.143.436,00	81,90 (Baik)	9.596.695.916,00	82,00 (Baik)	9.857.588.282,00	82,10 (Baik)	10.197.038.259,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763,847,000		860.352.500,00		877.851.497,00		900.133.003,00		924.603.699,00		956.442.800,00		
Terfasilitasinya layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli	persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi	100%	100%	333,957,000	100%	389.152.000,00	100%	397.067.093,00	100%	407.145.395,00	100%	418.213.906,00	100%	432.615.269,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				294,257,000		333.952.000,00		340.744.362,00		349.393.088,00		358.891.565,00		371.250.139,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	294,257,000	2 laporan	333.952.000,00	2 laporan	340.744.362,00	2 laporan	349.393.088,00	2 laporan	358.891.565,00	2 laporan	371.250.139,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25,300,000		40.800.000,00		41.629.845,00		42.686.488,00		43.846.948,00		45.356.835,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	25,300,000	1 laporan	40.800.000,00	1 laporan	41.629.845,00	1 laporan	42.686.488,00	1 laporan	43.846.948,00	1 laporan	45.356.835,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14,400,000		14.400.000,00		14.692.886,00		15.065.819,00		15.475.393,00		16.008.295,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	14,400,000	1 laporan	14.400.000,00	1 laporan	14.692.886,00	1 laporan	15.065.819,00	1 laporan	15.475.393,00	1 laporan	16.008.295,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				7,607,520,261		5.325.362.250,00		5.433.676.593,00		5.571.593.420,00		5.723.060.778,00		5.920.136.648,00		
Terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan Setda	persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi	100%	100%	7,607,520,261	100%	5.325.362.250,00	100%	5.433.676.593,00	100%	5.571.593.420,00	100%	5.723.060.778,00	100%	5.920.136.648,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1,258,849,283		1.111.961.200,00		1.134.577.757,00		1.163.375.458,00		1.195.002.568,00		1.236.152.944,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	11 paket	12 paket	1,258,849,283	11 paket	1.111.961.200,00	11 paket	1.134.577.757,00	11 paket	1.163.375.458,00	11 paket	1.195.002.568,00	11 paket	1.236.152.944,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				664,858,653		512.250.000,00		522.668.826,00		535.935.133,00		550.504.875,00		569.461.730,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	6 paket	664,858,653	6 paket	512.250.000,00	6 paket	522.668.826,00	6 paket	535.935.133,00	6 paket	550.504.875,00	6 paket	569.461.730,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				5,683,812,325		3.701.151.050,00		3.776.430.010,00		3.872.282.829,00		3.977.553.335,00		4.114.521.974,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	30 paket	38 paket	5,683,812,325	24 paket	3.701.151.050,00	24 paket	3.776.430.010,00	24 paket	3.872.282.829,00	24 paket	3.977.553.335,00	24 paket	4.114.521.974,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				5,604,340,000		3.458.065.000,00		3.528.399.750,00		3.617.957.101,00		3.716.313.598,00		3.844.286.342,00		
Terfasilitasinya pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	100%	100%	5,604,340,000	100%	3.458.065.000,00	100%	3.528.399.750,00	100%	3.617.957.101,00	100%	3.716.313.598,00	100%	3.844.286.342,00		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				4,280,027,000		2.271.604.000,00		2.317.806.920,00		2.376.637.172,00		2.441.247.586,00		2.525.312.923,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	4,280,027,000	12 laporan	2.271.604.000,00	12 laporan	2.317.806.920,00	12 laporan	2.376.637.172,00	12 laporan	2.441.247.586,00	12 laporan	2.525.312.923,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1,299,850,000		1.161.986.000,00		1.185.620.025,00		1.215.713.267,00		1.248.763.217,00		1.291.764.877,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	1,299,850,000	12 laporan	1.161.986.000,00	12 laporan	1.185.620.025,00	12 laporan	1.215.713.267,00	12 laporan	1.248.763.217,00	12 laporan	1.291.764.877,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				24,463,000		24.475.000,00		24.972.805,00		25.606.662,00		26.302.795,00		27.208.542,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	24,463,000	12 laporan	24.475.000,00	12 laporan	24.972.805,00	12 laporan	25.606.662,00	12 laporan	26.302.795,00	12 laporan	27.208.542,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				7,350,082,200		7.541.925.442,00		7.695.323.207,00		7.890.644.827,00		8.105.157.095,00		8.384.261.421,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90	2,966,999,500	91	3.031.978.500,00	92	3.093.646.933,00	93	3.172.169.448,00	94	3.258.406.921,00	95	3.370.611.466,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun	100%	100%	2,966,999,500	100%	3.031.978.500,00	100%	3.093.646.933,00	100%	3.172.169.448,00	100%	3.258.406.921,00	100%	3.370.611.466,00		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2,966,999,500		3.031.978.500,00		3.093.646.933,00		3.172.169.448,00		3.258.406.921,00		3.370.611.466,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	2 dokumen	2,966,999,500	2 dokumen	3.031.978.500,00	2 dokumen	3.093.646.933,00	2 dokumen	3.172.169.448,00	2 dokumen	3.258.406.921,00	2 dokumen	3.370.611.466,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan bina mental spiritual 1	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Terfasilitasinya kegiatan bina mental spiritual	Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90	207,868,000	91	191.954.000,00	92	195.858.217,00	93	200.829.463,00	94	206.289.142,00	95	213.392.791,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Tersusunnya bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan	Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun	100%	100%	207,868,000	100%	191.954.000,00	100%	195.858.217,00	100%	200.829.463,00	100%	206.289.142,00	100%	213.392.791,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				207,868,000		191.954.000,00		195.858.217,00		200.829.463,00		206.289.142,00		213.392.791,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	2 dokumen	207,868,000	2 dokumen	191.954.000,00	2 dokumen	195.858.217,00	2 dokumen	200.829.463,00	2 dokumen	206.289.142,00	2 dokumen	213.392.791,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat 1	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	strategis Sekretariat Daerah (persen)															
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90	93,660,000	91	127.585.000,00	92	130.179.994,00	93	133.484.205,00	94	137.113.059,00	95	141.834.602,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	100%	100%	93,660,000	100%	127.585.000,00	100%	130.179.994,00	100%	133.484.205,00	100%	137.113.059,00	4	141.834.602,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				93,660,000		127.585.000,00		130.179.994,00		133.484.205,00		137.113.059,00		141.834.602,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	4 dokumen	93,660,000	4 dokumen	127.585.000,00	4 dokumen	130.179.994,00	4 dokumen	133.484.205,00	4 dokumen	137.113.059,00	4 dokumen	141.834.602,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial 1	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan penanganan stunting	Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial 2	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial 3	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,268,527,500		3.351.517.500,00		3.419.685.144,00		3.506.483.116,00		3.601.809.122,00		3.725.838.859,00		
Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (predikat)	Cepat Berkembang (nilai 393,91)	Cepat Berkembang (nilai 395)	940,018,250	Cepat Berkembang (nilai 396)	1.242.162.750,00	Cepat Berkembang (nilai 396,5)	1.267.427.517,00	Cepat Berkembang (nilai 397)	1.299.597.186,00	Cepat Berkembang (nilai 397,5)	1.334.927.573,00	Cepat Berkembang (nilai 398)	1.380.896.338,00		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	100%	100%	940,018,250	100%	1.242.162.750,00	100%	1.267.427.517,00	100%	1.299.597.186,00	100%	1.334.927.573,00	100%	1.380.896.338,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				940,018,250		1.242.162.750,00		1.267.427.517,00		1.299.597.186,00		1.334.927.573,00		1.380.896.338,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7	8	940,018,250	7	1.242.162.750,00	7	1.267.427.517,00	7	1.299.597.186,00	7	1.334.927.573,00	7	1.380.896.338,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan 1	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (predikat)	Cepat Berkembang (nilai 393,91)	Cepat Berkembang (nilai 395)		Cepat Berkembang (nilai 396)	-	Cepat Berkembang (nilai 396,5)	-	Cepat Berkembang (nilai 397)	-	Cepat Berkembang (nilai 397,5)	-	Cepat Berkembang (nilai 398)	-		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan						1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Terlaksananya evaluasi kinerja kemantren dan kelurahan	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 dokumen	8 dokumen		7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan 2	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (predikat)	Cepat Berkembang (nilai 393,91)	Cepat Berkembang (nilai 395)		Cepat Berkembang (nilai 396)	-	Cepat Berkembang (nilai 396,5)	-	Cepat Berkembang (nilai 397)	-	Cepat Berkembang (nilai 397,5)	-	Cepat Berkembang (nilai 398)	-		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Terfasilitasinya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 dokumen	8 dokumen		7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan (persen)	-	90	230,110,560	91	532.384.712,00	92	543.213.064,00	93	557.000.822,00	94	572.143.249,00	95	591.845.231,00		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	-	100%	230,110,560	100%	532.384.712,00	100%	543.213.064,00	100%	557.000.822,00	100%	572.143.249,00	100%	591.845.231,00		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				230,110,560		532.384.712,00		543.213.064,00		557.000.822,00		572.143.249,00		591.845.231,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 dokumen	4 dokumen	230,110,560	4 dokumen	532.384.712,00	4 dokumen	543.213.064,00	4 dokumen	557.000.822,00	4 dokumen	572.143.249,00	4 dokumen	591.845.231,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan 1	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan (persen)	-	90	184,958,890	91	220.406.080,00	92	224.888.994,00	93	230.597.095,00	94	236.866.025,00	95	245.022.602,00		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	184,958,890	100%	220.406.080,00	100%	224.888.994,00	100%	230.597.095,00	100%	236.866.025,00	100%	245.022.602,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				184,958,890		220.406.080,00		224.888.994,00		230.597.095,00		236.866.025,00		245.022.602,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen	184,958,890	4 dokumen	220.406.080,00	4 dokumen	224.888.994,00	4 dokumen	230.597.095,00	4 dokumen	236.866.025,00	4 dokumen	245.022.602,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan 2	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Tersusunnya bahan kebijakan administrasi pemerintahan	Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan 3	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan (persen)	-	90		91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1,355,087,700		1.994.953.542,00		2.035.529.575,00		2.087.195.103,00		2.143.936.847,00		2.217.764.171,00		
Tersusunnya bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 dokumen	8 dokumen		7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks reformasi hukum (nilai)	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)	842,000,000	AA (90 - 97.55)	629.265.000,00	AA (90 - 97.6)	642.063.833,00	AA (90 - 97.65)	658.360.608,00	AA (90 - 97,7)	676.258.565,00	AA (90 - 97.75)	699.545.799,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,728,279,000		1.482.730.400,00		1.512.888.154,00		1.551.288.070,00		1.593.460.836,00		1.648.332.296,00		
Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana	100%	100%	842,000,000	100%	629.265.000,00	100%	642.063.833,00	100%	658.360.608,00	100%	676.258.565,00	100%	699.545.799,00		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				842,000,000		629.265.000,00		642.063.833,00		658.360.608,00		676.258.565,00		699.545.799,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	295 dokumen	300 dokumen	842,000,000	300 dokumen	629.265.000,00	300 dokumen	642.063.833,00	300 dokumen	658.360.608,00	300 dokumen	676.258.565,00	300 dokumen	699.545.799,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas reformasi hukum 1	Indeks reformasi hukum (nilai)	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)		AA (90 - 97.55)	622.680.400,00	AA (90 - 97.6)	635.345.307,00	AA (90 - 97.65)	651.471.553,00	AA (90 - 97,7)	669.182.227,00	AA (90 - 97.75)	692.225.784,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.482.730.400,00		1.512.888.154,00		1.551.288.070,00		1.593.460.836,00		1.648.332.296,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terdokumentasikannya produk hukum	persentase produk hukum yang didokumentasikan	100%	100%	595,444,000	100%	622.680.400,00	100%	635.345.307,00	100%	651.471.553,00	100%	669.182.227,00	100%	692.225.784,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				595,444,000		622.680.400,00		635.345.307,00		651.471.553,00		669.182.227,00		692.225.784,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 dokumen	5 dokumen	595,444,000	5 dokumen	622.680.400,00	5 dokumen	635.345.307,00	5 dokumen	651.471.553,00	5 dokumen	669.182.227,00	5 dokumen	692.225.784,00		
Meningkatnya kualitas reformasi hukum 2	Indeks reformasi hukum (nilai)	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)		AA (90 - 97.55)	-	AA (90 - 97.6)	-	AA (90 - 97.65)	-	AA (90 - 97,7)	-	AA (90 - 97.75)	-		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,728,279,000		1.482.730.400,00		1.512.888.154,00		1.551.288.070,00		1.593.460.836,00		1.648.332.296,00		
Terlaksananya pembudayaan hukum masyarakat	persentase sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas reformasi hukum 3	Indeks reformasi hukum (nilai)	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)		AA (90 - 97.55)	230.785.000,00	AA (90 - 97.6)	235.479.014,00	AA (90 - 97.65)	241.455.909,00	AA (90 - 97,7)	248.020.044,00	AA (90 - 97.75)	256.560.713,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,728,279,000		1.482.730.400,00		1.512.888.154,00		1.551.288.070,00		1.593.460.836,00		1.648.332.296,00		
Terfasilitasinya bantuan hukum	persentase bantuan hukum yang terfasiltasi	100%	100%	290,835,000	100%	230.785.000,00	100%	235.479.014,00	100%	241.455.909,00	100%	248.020.044,00	100%	256.560.713,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				290,835,000		230.785.000,00		235.479.014,00		241.455.909,00		248.020.044,00		256.560.713,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 kasus	4 kasus	290,835,000	3 kasus	230.785.000,00	5 kasus	235.479.014,00	5 kasus	241.455.909,00	5 kasus	248.020.044,00	5 kasus	256.560.713,00		
Meningkatnya kualitas reformasi hukum 4	Indeks reformasi hukum (nilai)	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)		AA (90 - 97.55)	-	AA (90 - 97.6)	-	AA (90 - 97.65)	-	AA (90 - 97,7)	-	AA (90 - 97.75)	-		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,728,279,000		1.482.730.400,00		1.512.888.154,00		1.551.288.070,00		1.593.460.836,00		1.648.332.296,00		
Terfasilitasinya rencana aksi nasional HAM	nilai rencana aksi nasional HAM	96,4 nilai	90 - 96.5 nilai		90 - 96.6 nilai	-	90 - 96.7 nilai	-	90 - 96.8 nilai	-	90 - 96.9 nilai	-	97 nilai	-		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 kasus	4 kasus		3 kasus	-	5 kasus	-	5 kasus	-	5 kasus	-	5 kasus	-		
Meningkatnya peran kerjasama daerah dalam mendukung program pembangunan	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti (persen)	99.72	95.25	998,188,000	95.93	712.724.000,00	96	727.220.334,00	96.5	745.678.538,00	97	765.950.290,00	97.5	792.326.095,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				998,188,000		712.724.000,00		727.220.334,00		745.678.538,00		765.950.290,00		792.326.095,00		
Terfasilitasinya proses kerja sama daerah	Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi	-	1 dokumen	196,750,000	1 dokumen	222.935.000,00	1 dokumen	227.469.350,00	1 dokumen	233.242.945,00	1 dokumen	239.583.805,00	1 dokumen	247.833.969,00		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				196,750,000		222.935.000,00		227.469.350,00		233.242.945,00		239.583.805,00		247.833.969,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	196,750,000	2 dokumen	222.935.000,00	2 dokumen	227.469.350,00	2 dokumen	233.242.945,00	2 dokumen	239.583.805,00	2 dokumen	247,833,969.00		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP	2 laporan	2 laporan	242,760,000	2 laporan	101.320.000,00	2 laporan	103.380.782,00	2 laporan	106.004.778,00	2 laporan	108.886.586,00	2 laporan	112.636.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				242,760,000		101.320.000,00		103.380.782,00		106.004.778,00		108.886.586,00		112.636.140,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	3 laporan	242,760,000	3 laporan	101.320.000,00	3 laporan	103.380.782,00	3 laporan	106.004.778,00	3 laporan	108.886.586,00	3 laporan	112.636.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi	45 dokumen	45 dokumen	558,678,000	46 dokumen	388.469.000,00	47 dokumen	396.370.202,00	48 dokumen	406.430.815,00	49 dokumen	417.479.899,00	50 dokumen	431.855.986,00		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				558,678,000		388.469.000,00		396.370.202,00		406.430.815,00		417.479.899,00		431.855.986,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen	45 dokumen	558,678,000	45 dokumen	388.469.000,00	45 dokumen	396.370.202,00	45 dokumen	406.430.815,00	45 dokumen	417.479.899,00	45 dokumen	431.855.986,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1,996,951,320		1.930.387.700,00		1.969.650.507,00		2.019.643.900,00		2.074.549.221,00		2.145.987.154,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD (persen)	-	100	409,221,500	100	298.791.500,00	100	304.868.721,00	100	312.606.856,00	100	321.105.275,00	100	332.162.664,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (persen)	80.77	84.62		88.46		92.31		92.31		96.15		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan BUMD	Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun	-	1 dokumen	409,221,500	1 dokumen	298.791.500,00	1 dokumen	304.868.721,00	1 dokumen	312.606.856,00	1 dokumen	321.105.275,00	1 dokumen	332.162.664,00		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				409,221,500		298.791.500,00		304.868.721,00		312.606.856,00		321.105.275,00		332.162.664,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen	24 dokumen	409,221,500	24 dokumen	298.791.500,00	24 dokumen	304.868.721,00	24 dokumen	312.606.856,00	24 dokumen	321.105.275,00	24 dokumen	332.162.664,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD 1	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (persen)	80.77	84.62		88.46	-	92.31	-	92.31	-	96.15	-	100	-		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD (persen)	-	100		100		100		100		100		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan BLUD	Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD 2	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD (persen)	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (persen)	80.77	84.62		88.46		92.31		92.31		96.15		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan	-	3 BUMD		3 BUMD	-	3 BUMD	-	3 BUMD	-	3 BUMD	-	3 BUMD	-		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD 3	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (persen)	80.77	84.62		88.46	-	92.31	-	92.31	-	96.15	-	100	-		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD (persen)	-	100		100		100		100		100		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Terlaksananya pembinaan BLUD	Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan	-	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35	205,824,000	88.24	305.224.000,00	90	311.432.054,00	90.91	319.336.779,00	91.67	328.018.155,00	92.31	339.313.591,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi	-	1 dokumen	205,824,000	1 dokumen	305.224.000,00	1 dokumen	311.432.054,00	1 dokumen	319.336.779,00	1 dokumen	328.018.155,00	1 dokumen	339.313.591,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	daerah yang disusun															
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				205,824,000		305.224.000,00		311.432.054,00		319.336.779,00		328.018.155,00		339.313.591,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 laporan	5 laporan	205,824,000	5 laporan	305.224.000,00	5 laporan	311.432.054,00	5 laporan	319.336.779,00	5 laporan	328.018.155,00	5 laporan	339.313.591,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 1	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35		88.24	-	90	-	90.91	-	91.67	-	92.31	-		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 laporan	5 laporan		5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 2	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35		88.24	-	90	-	90.91	-	91.67	-	92.31	-		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Perekonomian																
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 laporan	5 laporan		5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 3	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35		88.24	-	90	-	90.91	-	91.67	-	92.31	-		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan kepariwisataan	Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 laporan	5 laporan		5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-	5 laporan	-		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 4	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35	196,450,000	88.24	164.450.000,00	90	167.794.804,00	90.91	172.053.748,00	91.67	176.731.140,00	92.31	182.816.948,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan Pembiayaan Keuangan Usaha Mikro	Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	-	1 dokumen	196,450,000	1 dokumen	164.450.000,00	1 dokumen	167.794.804,00	1 dokumen	172.053.748,00	1 dokumen	176.731.140,00	1 dokumen	182.816.948,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				196,450,000		164.450.000,00		167.794.804,00		172.053.748,00		176.731.140,00		182.816.948,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen	2 dokumen	196,450,000	2 dokumen	164.450.000,00	2 dokumen	167.794.804,00	2 dokumen	172.053.748,00	2 dokumen	176.731.140,00	2 dokumen	182.816.948,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 5	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif (persen)	-	82.35		88.24	-	90	-	90.91	-	91.67	-	92.31	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (persen)	98.54	98.57		98.60	252.844.200,00	98.63	257.986.884,00	98.66	264.535.071,00	98.69	271.726.627,00	98.72	281.083.642,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				811,495,500		768.465.500,00		784.095.579,00		803.997.383,00		825.854.570,00		854.293.203,00		
Tersusunnya bahan kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (persen)	89	90		91		92		93		94		95			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				630,232,000		697.286.200,00		711.468.540,00		729.526.935,00		749.359.595,00		775.164.091,00		
Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	100%	100%	224,274,600	100%	252.844.200,00	100%	257.986.884,00	100%	264.535.071,00	100%	271.726.627,00	100%	281.083.642,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				224,274,600		252.844.200,00		257.986.884,00		264.535.071,00		271.726.627,00		281.083.642,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	12 laporan	224,274,600	12 laporan	252.844.200,00	12 laporan	257.986.884,00	12 laporan	264.535.071,00	12 laporan	271.726.627,00	12 laporan	281.083.642,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan 1	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (persen)	98.54	98.57	189,131,400	98.60	242.429.000,00	98.63	247.359.845,00	98.66	253.638.298,00	98.69	260.533.619,00	98.72	269.505.198,00		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (persen)	89	90		91		92		93		94		95			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				630,232,000		697.286.200,00		711.468.540,00		729.526.935,00		749.359.595,00		775.164.091,00		
Tersusunnya bahan kebijakan isu strategis	Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun	100%	100%	189,131,400	100%	242.429.000,00	100%	247.359.845,00	100%	253.638.298,00	100%	260.533.619,00	100%	269.505.198,00		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				189,131,400		242.429.000,00		247.359.845,00		253.638.298,00		260.533.619,00		269.505.198,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	189,131,400	2 dokumen	242.429.000,00	2 dokumen	247.359.845,00	2 dokumen	253.638.298,00	2 dokumen	260.533.619,00	2 dokumen	269.505.198,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan 2	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (persen)	98.54	98.57		98.60	-	98.63	-	98.66	-	98.69	-	98.72	-		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (persen)	89	90		91		92		93		94		95			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				630,232,000		697.286.200,00		711.468.540,00		729.526.935,00		749.359.595,00		775.164.091,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan	Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan 3	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.54	98.57	216,826,000	98.60	202.013.000,00	98.63	206.121.811,00	98.66	211.353.566,00	98.69	217.099.349,00	98.72	224.575.251,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	(persen)															
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (persen)	89	90		91		92		93		94		95			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						697.286.200,00		711.468.540,00		729.526.935,00		749.359.595,00		775.164.091,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pembangunan infrastruktur	Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun	100%	100%	216,826,000	100%	202.013.000,00	100%	206.121.811,00	100%	211.353.566,00	100%	217.099.349,00	100%	224.575.251,00		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				216,826,000		202.013.000,00		206.121.811,00		211.353.566,00		217.099.349,00		224.575.251,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	12 laporan	216,826,000	12 laporan	202.013.000,00	12 laporan	206.121.811,00	12 laporan	211.353.566,00	12 laporan	217.099.349,00	12 laporan	224.575.251,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan 4	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (persen)	89			91	-	92	-	93	-	94	-	95	-		
	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (persen)	98.54			98.60		98.63		98.66		98.69		98.72			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				630,232,000		697.286.200,00		711.468.540,00		729.526.935,00		749.359.595,00		775.164.091,00		
Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-		
Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan (nilai)	84.21	84.5	329,443,000	85	251.560.000,00	85.5	256.676.563,00	86	263.191.492,00	86.5	270.346.522,00	87	279.656.014,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				555,223,820		464.636.000,00		474.086.388,00		486.119.582,00		499.335.056,00		516.529.860,00		
Terlaksananya pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	Persentase monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang	100%	100%	99,958,000	100%	93.790.000,00	100%	95.697.626,00	100%	98.126.610,00	100%	100.794.245,00	100%	104.265.136,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				99,958,000		93.790.000,00		95.697.626,00		98.126.610,00		100.794.245,00		104.265.136,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	99,958,000	1 dokumen	93.790.000,00	1 dokumen	95.697.626,00	1 dokumen	98.126.610,00	1 dokumen	100.794.245,00	1 dokumen	104.265.136,00		
Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Persentase pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa	100%	100%	229,485,000	100%	157.770.000,00	100%	160.978.937,00	100%	165.064.882,00	100%	169.552.277,00	100%	175.390.878,00		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				229,485,000		157.770.000,00		160.978.937,00		165.064.882,00		169.552.277,00		175.390.878,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	1 dokumen	229,485,000	1 dokumen	157.770.000,00	1 dokumen	160.978.937,00	1 dokumen	165.064.882,00	1 dokumen	169.552.277,00	1 dokumen	175.390.878,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan 1	Indeks tata kelola pengadaan (nilai)	84.21	84.5	225,780,820	85	213.076.000,00	85.5	217.409.825,00	86	222.928.090,00	86.5	228.988.534,00	87	236.873.846,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				555,223,820		464.636.000,00		474.086.388,00		486.119.582,00		499.335.056,00		516.529.860,00		
Tersusunnya bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun	100%	100%	225,780,820	100%	213.076.000,00	100%	217.409.825,00	100%	222.928.090,00	100%	228.988.534,00	100%	236.873.846,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				225,780,820		213.076.000,00		217.409.825,00		222.928.090,00		228.988.534,00		236.873.846,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 orang	50 orang	225,780,820	50 orang	213.076.000,00	50 orang	217.409.825,00	50 orang	222.928.090,00	50 orang	228.988.534,00	50 orang	236.873.846,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan 2	Indeks tata kelola pengadaan (nilai)	84.21	84.5	-	85	-	85.5	-	86	-	86.5	-	87	-		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				555,223,820		464.636.000,00		474.086.388,00		486.119.582,00		499.335.056,00		516.529.860,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 orang	50 orang		50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				289,104,000		44.890.000,00		49.379.000,00		54.316.900,00		59.748.590,00		65.723.449,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (persen)	56.1	75	289,104,000	100	44.890.000,00	100	49.379.000,00	100	54.316.900,00	100	59.748.590,00	100	65.723.449,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				269,690,000		25.865.000,00		28.451.500,00		31.296.650,00		34.426.315,00		37.868.947,00		
Tertatanya Kelembagaan Keistimewaan Kota Yogyakarta	persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	-	100%	269,690,000	100%	25.865.000,00	100%	28.451.500,00	100%	31.296.650,00	100%	34.426.315,00	100%	37.868.947,00		
4.01.04.5.01.0003 - Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				269,690,000		25.865.000,00		28.451.500,00		31.296.650,00		34.426.315,00		37.868.947,00		
Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 lembaga	3 lembaga	269,690,000	3 lembaga	25.865.000,00	3 lembaga	28.451.500,00	3 lembaga	31.296.650,00	3 lembaga	34.426.315,00	3 lembaga	37.868.947,00		
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				19,414,000		19.025.000,00		20.927.500,00		23.020.250,00		25.322.275,00		27.854.502,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersusunnya bahan kebijakan Budaya Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	-	100%	19,414,000	100%	19.025.000,00	100%	20.927.500,00	100%	23.020.250,00	100%	25.322.275,00	100%	27.854.502,00		
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				19,414,000		19.025.000,00		20.927.500,00		23.020.250,00		25.322.275,00		27.854.502,00		
Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	19,414,000	1 dokumen	19.025.000,00	1 dokumen	20.927.500,00	1 dokumen	23.020.250,00	1 dokumen	25.322.275,00	1 dokumen	27.854.502,00		

4.4. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembanguan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah					
1.	Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 2	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 1	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 2	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian 1	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
2.	Penguatan akses pendanaan pembangunan	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas reformasi hukum 4	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	Penataan Kelembagaan yang Adaptif		Meningkatnya kualitas reformasi hukum	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	Perlindungan Hukum bagi Warga		Meningkatnya kualitas reformasi hukum 1	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 2	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Koordinasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 3	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 4	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 3	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 1	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas reformasi hukum 2	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
3.	Pemajuan Ekonomi Kreatif	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 1	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 2	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian,	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			UMKM dan ekonomi kreatif 3		
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 4	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 5	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 1	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 3	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 2	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif 4	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian,	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			UMKM dan ekonomi kreatif 5		
4.	Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
				4.01.04.5.01.0003 - Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	
				4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
				4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah									
2.	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
4.	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
5.	Indeks Perekonomian	Nilai	93,01	85,33	89,13	91,29	91,99	93,85	94,55	
6.	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	-	49,88	53,01	55,76	58,2	60,37	62,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
8.	Indeks Pembangunan	Nilai	91,57	91,95	92,39	92,83	93,28	93,72	94,16	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tidak menentukan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	positif	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
3.	Indeks Pembangunan	positif	Nilai	91,57	91,95	92,39	92,83	93,28	93,72	94,16	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4.	Indeks Perekonomian	positif	Nilai	93,01	85,33	89,13	91,29	91,99	93,85	94,55	
5.	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	positif	Nilai	-	49,88	53,01	55,76	58,2	60,37	62,33	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota	positif	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
7.	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	positif	Predikat	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
8.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	negatif	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	positif	Persentase	41,12	49	50	51	52	53	54	
10.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	positif	Persentase	41,37	20	20	20	20	20	20	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah										
11.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	positif	Persentase	52,95	45	46	47	48	49	50	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

LAMPIRAN

POHON KINERJA

OUTCOME ULTIMATE

OUTCOME INTERMEDIATE

OUTCOME INTERMEDIATE

OUTCOME IMMEDIATE

OUTPUT

OUTPUT

Meningkatnya Kepastian Tata Kelola Pemerintahan

- Indeks Reformasi Birokrasi
- Nilai AKIP

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

CASCADING KINERJA

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Uraian Perubahan Nomenklatur/ penyempu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	89,61-97,00 (Sangat Baik);	89,62-97,01 (Sangat Baik);	89,63-97,02 (Sangat Baik);	89,64-97,03 (Sangat Baik);	89,65-97,03 (Sangat Baik);	89,66-97,04 (Sangat Baik)	1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	B.3)% x Persentase implementasi kebijakan bina mental + 50% x Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosial + 50% x Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat	49,696%	53,01%	66,764%	98,265%	460,37%	62,33%	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai bentuk tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan rancangan bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan terkait bina mental spiritual yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang ditetapkan dibagi jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusun dikali 100 persen	1. Kepala Tim Kerja Bina Mental	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kepala Tim Kerja Bina Mental	
																																Terfasilitasinya kegiatan bina mental spiritual	Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasi dibagi Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasi dikali 100 persen		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kepala Tim Kerja Bina Mental	
																				Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan rancangan bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%			Tersusunnya bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusun dikali 100 persen	2. Kepala Tim Kerja Kesejahteraan Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Tim Kerja Kesejahteraan Sosial	
																																Tersusunnya bahan kebijakan penanganan stunting	Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusun dikali 100 persen		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Tim Kerja Kesejahteraan Sosial	
																																Tersusunnya bahan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusun dikali 100 persen		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Tim Kerja Kesejahteraan Sosial	
																																Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusun dikali 100 persen		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kearifan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Tim Kerja Kesejahteraan Sosial	
																				Meningkatnya kualitas kebijakan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan rancangan bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%			Tersusunnya bahan kebijakan pemberdayaan perempuan	Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan yang seharusnya disusun dikali 100 persen	2. Kepala Tim Kerja Pemberdayaan & Hukra	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perkawinan, Perceraian, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perkawinan, Perceraian, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Kepala Tim Kerja Pemberdayaan & Hukra	
																																Tersusunnya bahan kebijakan pengelolaan pendidikan	Persentase bahan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan yang seharusnya disusun dikali 100 persen																		

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Pagu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pagu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur/ pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030																			
																																		Tersusunnya bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Jumlah bahan kebijakan tentuk sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dibagi jumlah bahan kebijakan tentuk sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dikali 100 persen			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja	Kepala Tim Kerja Reformasi Birokrasi	
																				Program Penyelenggaran Kesbirmawan Kesbangpolinmas Urusan Kelembagaan dan Kebiklimasyarakatan		2. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Kesbirmawan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Kesbirmawan (dibagi) jumlah total PerangkatDaerah x (kali) 100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%																										
																																Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tersusunnya bahan kebijakan Budaya Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait Budaya Pemerintahan yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait Budaya Pemerintahan yang disusun dikali 100 persen	Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik	
																							Kegiatan Perlakuan Kelembagaan dan Kebiklimasyarakatan Kesbirmawan	Tertibnya Kelembagaan Kesbirmawan Kota Yogyakarta	Persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu kesbirmawan yang tertib	Jumlah perangkat daerah yang direviu dibagi jumlah perangkat daerah total yang(di dasarkan dikali 100 persen	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan		Perlakuan Bantuk Kelembagaan Ad Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlakuan Bantuk Kelembagaan Ad Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Ditetukan Perlakuan Bantuk Kelembagaan Ad Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan	
																				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut/ou strategi/arah pembangunan pemerintahan	Jumlah ou strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah ou strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	Ketrag Tata Pemerintahan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya bahan kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun dikali 100 persen	1. Ketua Tim kerja Administrasi Pemerintahan 2. Ketua Tim Kerja Administrasi Kesejahteraan 3. Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Ketua Tim kerja Administrasi Pemerintahan	
																																	Tersusunnya bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun dikali 100 persen			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Ketua Tim kerja Administrasi Kewilayahan	
																																	Tersusunnya bahan kebijakan administrasi pemerintahan	Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun dikali 100 persen			Fasilitasi Perkasoonan Otonomi Daerah	Terlaksananya Perakan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Perakan Administrasi Pemerintahan	Ketua Tim kerja Otonomi Daerah	
																																	Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang ditelaah tepat waktu	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang ditelaah tepat waktu dibagi total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang ditelaah dikali 100 persen			1. Perakan Administrasi Pemerintahan 2. Fasilitasi Perkasoonan Otonomi Daerah	1.Terlaksananya Perakan Administrasi Pemerintahan 2.Terlaksananya Fasilitasi Perkasoonan Otonomi Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Perakan Administrasi Pemerintahan 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perkasoonan Otonomi Daerah	1. Ketua Tim kerja Administrasi Pemerintahan 2. Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah	
																																	Tersusunnya bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun dikali 100 persen			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Ketua Tim kerja Administrasi Kewilayahan	
																																	Terlaksananya evaluasi kinerja kemantren dan kelurahan	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi dibagi jumlah kemantren dan kelurahan dikali 100 persen			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Ketua Tim kerja Administrasi Kewilayahan	
																																	Terfasilitasinya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah LKK yang terfasilitasi dibagi total jumlah LKK dikali 100 persen			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Ketua Tim kerja Administrasi Kewilayahan	
											Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Hasil Penilaian IRHI oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	AA (90 - 97.00)	AA (90 - 97.00)	AA (90 - 97.0)	AA (90 - 97.00)	AA (90 - 97.7%)	AA (90 - 97.7%)	Ketrag Hukum	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Persentase penyusunan produk hukum daerah yang terfasilitasi	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dibagi total jumlah produk hukum dikali 100%	1. Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan	
																																	Tersedianya produk hukum yang didokumentasikan	persentase produk hukum yang didokumentasikan	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dibagi total jumlah produk hukum dikali 100 persen	2. Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum	
																																	Tersedianya pembudayaan hukum masyarakat	Persentasi sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan dibagi total jumlah rencana sosialisasi/ penyuluhan dikali 100 persen			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat	Jumlah sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum	
																																	Terfasilitasinya bantuan hukum	Persentase bantuan hukum yang terfasilitasi	Jumlah perkara masuk dibagi jumlah perkara yang diberikan dikali 100 persen	3. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi penanganan perkara/kasus	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Ketua Tim Kerja Bantuan hukum dan HAM	
																																	Terfasilitasinya kerjasama ekd nasional (vtk)	Nilai kerjasama ekd nasional HAM	Hasil penilaian tervalisi HAM oleh Kemenkumham HAM			Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya pelaksanaan rencana aksi nasional (vtk) Aksi Manusia	Jumlah layanan SMS HAM	Ketua Tim Kerja Bantuan hukum dan HAM	
											Meningkatnya peran kerjasama daerah dalam mendukung program pembangunan	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti (jumlah total PKS yg masih berlaku)) x 100%	93,20%	93,93%	95,03%	96,50%	97,00%	97,03%	Ketrag. Perekonomian dan Kerjasama	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	Tersusunnya bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi	Jumlah dokumen kajian dan telaah staf dalam 1 tahun	KETUA TIM KERJA KERJASAMA DAERAH		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	KETUA TIM KERJA KERJASAMA DAERAH	
																																	Terfasilitasinya proses kerja sama daerah	Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	Jumlah dokumen komplasi fasilitasi kerja sama daerah dalam 1 tahun			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	KETUA TIM KERJA KERJASAMA DAERAH	
																																	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerah dalam 1 tahun			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	KETUA TIM KERJA KERJASAMA DAERAH	
		6. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota	Nilai SKM dari masing-masing OPD dibagi jumlah OPD	86,20 – 88,00 (Baik)	88,21 – 89,01 (Baik)	89,23 – 90,02 (Baik)	89,23 – 89,33 (Baik)	89,24 – 89,04 (Baik)	89,25 – 89,05 (Baik)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut/ou strategi/pelayanan publik	Jumlah ou strategis bidang pelayanan publik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah ou strategis bidang pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	Ketrag Organisasi	Kegiatan Penataan Organisasi	Tersusunnya bahan kebijakan pelayanan publik	Persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun dikali 100 persen	1. Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan 3. Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik	
																																	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan publik yang dipantau	Jumlah pengaduan dukan yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipantau dibagi total jumlah pengaduan yang membutuhkan pelayanan langsung kepada masyarakat dikali 100 persen			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik	
											Meningkatnya kualitas kebijakan administasi umum	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut/ou strategis/administasi umum	Jumlah ou strategis bidang administasi umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah ou strategis bidang administasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	90%	91%	92%	93%	94%	95%			Tersusunnya bahan kebijakan tatalaksana administasi umum	Persentase bahan kebijakan tatalaksana administasi umum yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait tatalaksana administasi umum yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait tatalaksana administasi umum yang disusun dikali 100 persen			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketua Tim Kerja Kesbidaksarasan dan Pelayanan Publik	
											Meningkatnya kualitas layanan umum dan keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Nilai hasil survey responden pengguna layanan di Bagian Umpro	81,60 (Baik)	81,70 (Baik)	81,80 (Baik)	81,90 (Baik)	82,00 (Baik)	82,1 (Baik)	Ketrag Umpro	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya layanan tata usaha administasi pimpinan dan staf ahli	Persentase layanan tata usaha administasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi	Jumlah layanan tata usaha administasi pimpinan dan staf ahli dibagi total layanan tata usaha administasi pimpinan dan staf ahli dikali 100 persen	1. Kasubbag Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli	
																																			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli	
																																			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubbag Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli	
																							Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan Setda	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang dibutuhkan dibagi total paketkebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah dikali 100 persen	2. Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
																																			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
																																			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
																							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan dibagi total jumlah kegiatan keprotokolan dan kemasyarakatan pimpinan dikali 100 persen	3. Kasubbag Protokol		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kasubbag Protokol	
																																			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kasubbag Protokol	
																																			Pendokumentasikan Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kasubbag Protokol	

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	TARGET						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030											
																																		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubag Kalitrip yang mengampu pengelolaan Aset di 5 Bagian	
																																		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubag Kalitrip yang mengampu pengelolaan Aset di 5 Bagian	
																														Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	IP ASN Setda	Hasil riset IP ASN Setda	Kasubag Kalitrip yang mengampu Umum dan Kepegawaian di 8 Bagian	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kasubag Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Set/ Ass	
																																		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Kasubag Kalitrip yang mengampu Kepegawaian di 8 Bagian	
																														Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan smig administrasi umum Setda	Hasil penilaian pengawasan smig administrasi umum	Kasubag Kalitrip yang mengampu Umum dan Kepegawaian di 8 Bagian	Sub Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian (Rekomdi Bag Umpeg)	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian (Rekomdi Bag Umpeg)	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian	
																																		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian	
																														Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase tercatat pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Setda	Jumlah belanja Setda yang diinputkan pada SIRUP=(belanj/ Jumlah belanja pada DPA Setda dikali 100%	Kasubag Kalitrip yang mengampu Umum dan Kepegawaian di 8 Bagian	Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 9 Bacan	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 9 Bacan	
																																		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubag Kalitrip yang mengampu Ka Tl Lan di 8 Bagian Umpeg, PKD, Hukum &Pbj	

DATA KINERJA

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	IKK adalah indeks yang menggambarkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.				Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Daerah		86,80 (Sangat Baik)	86,81-87,00 (Sangat Baik)	86,82-87,01 (Sangat Baik)	86,83-87,02 (Sangat Baik)	86,84-87,03 (Sangat Baik)	86,85-87,03 (Sangat Baik)	86,85-87,03 (Sangat Baik)	86,86-87,04 (Sangat Baik)
						Sumber data:									
						Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Daerah dengan rentang nilai: Unggul (91,00-100) Sangat Baik (80,00-90,99) Baik (65,00-79,99) Cukup (50,00-64,99) Kurang (<50,00)		86,80 (Sangat Baik)	86,81-87,00 (Sangat Baik)	86,82-87,01 (Sangat Baik)	86,83-87,02 (Sangat Baik)	86,84-87,03 (Sangat Baik)	86,85-87,03 (Sangat Baik)	86,85-87,03 (Sangat Baik)	86,86-87,04 (Sangat Baik)
			1.1 Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks yang mengukur implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat di Pemkot Yogyakarta. Kebijakan kesejahteraan rakyat yang diukur implementasinya adalah Perda Kota Yogyakarta dan Perwal Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan minimal 1 tahun meliputi urusan: a. Bina mental spiritual b. Kesejahteraan sosial, terdiri dari urusan Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan	8,33% x Persentase implementasi kebijakan bina mental + 50% x Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosial + 41,67% x Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persen	---	49,88%	53,01%	55,76%	58,20%	60,37%	60,37%	62,33%
						Sumber data:			49,88%	53,01%	55,76%	58,20%	60,37%	60,37%	62,33%
						Persentase implementasi kebijakan bina mental	*Persen*		*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
						- Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan bina mental			*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
						- Jumlah kebijakan penyelenggaraaan bina mental setelah 1 tahun ditetapkan			*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
						Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosial	*Persen*		*48,00%*	*51,85%*	*55,17%*	*58,06%*	*60,61%*	*60,61%*	*62,86%*
						- Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial			12	14	16	18	20	20	22
						- Jumlah kebijakan penyelenggaraaan kesejahteraan sosial setelah 1 tahun ditetapkan			25	27	29	31	33	33	35
						Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat	*Persen*		*42,11%*	*45,00%*	*47,62%*	*50,00%*	*52,17%*	*52,17%*	*54,17%*
						- Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat			8	9	10	11	12	12	13
						- Jumlah kebijakan penyelenggaraaan kesejahteraan masyarakat setelah 1 tahun ditetapkan			19	20	21	22	23	23	24
			1.2 Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD	Hasil Status Evaluasi oleh Kemendagri	predikat	Sedang (skor 3,29)	Sedang (3,35-3,40)	Tinggi (3,41-3,44)	Tinggi (3,45-3,46)	Tinggi (3,47-3,48)	Tinggi (3,49-3,50)	Tinggi (3,49-3,50)	Tinggi (3,51-3,52)
						Sumber data:									
						SK Mendagri dengan kategori predikat : Sangat Rendah (0,00-1,80) Rendah (1,81-2,60) Sedang (2,61-3,40) Tinggi (3,41-4,20) Sangat Tinggi (4,21-5,00)		Sedang (skor 3,29)	Sedang (3,35-3,40)	Tinggi (3,41-3,44)	Tinggi (3,45-3,46)	Tinggi (3,47-3,48)	Tinggi (3,49-3,50)	Tinggi (3,49-3,50)	Tinggi (3,51-3,52)
			1.3 Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat level	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemkot Yk.	Nilai SKM dari masing-masing OPD dibagi jumlah OPD		85,19 (Baik)	85,20 – 86,00 (Baik)	85,21 – 86,01 (Baik)	85,22 – 86,02 (Baik)	85,23 – 86,03 (Baik)	85,24 – 86,04 (Baik)	85,24 – 86,04 (Baik)	85,25 – 86,05 (Baik)
						Sumber data:		85,19							

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
			umum	Pemerintah Kota		Total nilai rata-rata SKM OPD	nilai	3578							
						Jumlah OPD	OPD	42							
			1.4 Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk"	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat		A (89,86)	A (87 - 90)	A (87,1 - 90)	A (87,2 - 90)	A (87,3 - 90)	A (87,4 - 90)	A (87,4 - 90)	A (87,5 - 90)
						Sumber data:									
						Hasil penilaian RB Setda oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setda 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setda 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Setda 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (89,86)	A (87 - 90)	A (87,1 - 90)	A (87,2 - 90)	A (87,3 - 90)	A (87,4 - 90)	A (87,4 - 90)	A (87,5 - 90)
			1.5 Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	indeks yang mengukur kondisi perekonomian Pemkot Yk dalam periode waktu tertentu dari aspek ekonomi kreatif, inflasi, UMKM, kinerja BUMD dan kinerja BLUD	40% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 30% x Kinerja kebijakan BUMD & BLUD + 30% x Kinerja BUMD dan BLUD	indeks	93,01	85,33	89,13	91,29	91,99	93,85	93,85	94,55
						Sumber data:									
						Realisasi kinerja kebijakan perekonomian	persen	100							
						Realisasi kinerja perjanjian kerja sama	persen	98,72							
						Realisasi kinerja BUMD & BLUD	persen	80,77							
						Realisasi kinerja kebijakan BUMD & BLUD	persen	---							
			1.6 Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pembangunan	indeks yang mengukur kualitas implementasi pengadaan barang dan jasa dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Pemkot Yk	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Tata Kelola Pengadaan	indeks	91,57	91,95	92,39	92,83	93,28	93,72	93,72	94,16
						Sumber data:									
						Realisasi kinerja ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (60%)	persen	98,54	98,57	98,60	98,63	98,66	98,69	98,69	98,72
						Realisasi kinerja kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (40%)	persen	89	90	91	92	93	94	94	95
						Indeks tata kelola pengadaan	indeks	84,21	84,5	85	85,5	86	86,5	86,5	87

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1 Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1.1.1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan bina mental spiritual dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara					Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual dibagi jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	Persen	---	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	95,00%
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara)	isu		2	2	2	2	2	2	2
									Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	isu		2	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara					Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial dibagi jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	Persen	---	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	95,00%
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara)	isu		2	2	2	2	2	2	2
									Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	isu		2	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara					Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat dibagi jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	Persen	---	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	95,00%
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara)	isu		2	2	2	2	2	2	2
									Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	isu		2	2	2	2	2	2	2
					1.1.1.1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual	Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Terfasilitasinya kegiatan bina mental spiritual	Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi	Mengukur realisasi fasilitasi terhadap kegiatan bina mental	Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasi dibagi Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasi dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasi	kegiatan	330	330	330	330	330	330	330	330
									Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasi	kegiatan	330	330	330	330	330	330	330	330
						Tersusunnya bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan penanganan stunting	Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
						Tersusunnya bahan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun dibagiJumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan	Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun dibagi Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang seharusnya disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang seharusnya disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2 Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	1.2.1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata pemerintahan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait urusan tata pemerintahan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan					Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	persen	---	90%	91%	92%	93%	94%	94%	95%
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	isu	---							
									Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	isu	---							
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Nilai Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah angka yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (berdasarkan Pemendari No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan.					Total Nilai Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan se Kota Yogyakarta dibagi Jumlah Kelurahan	predikat	Cepat Berkembang (nilai 393,91)	Cepat Berkembang (nilai 395)	Cepat Berkembang (nilai 396)	Cepat Berkembang (nilai 396,5)	Cepat Berkembang (nilai 397)	Cepat Berkembang (nilai 397,5)	Cepat Berkembang (nilai 397,5)	Cepat Berkembang (nilai 398)
									Sumber data:		393,91							
									Total nilai evaluasi kelurahan : Evaluasi Bidang Pemerintahan Evaluasi Bidang Kewilayahan Evaluasi Bidang Kemasyarakatan	nilai	17726							

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Jumlah kelurahan	kelurahan	45							
					1.2.1.1. Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya bahan kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun dikali 100 persen	persen	-	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun									
									target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun									
						Tersusunnya bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun dikali 100 persen	persen	-	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
									target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun									
						Tersusunnya bahan kebijakan administrasi pemerintahan	Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun dikali 100 persen	persen	-	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun									
									target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun									
						Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu dibagi total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu									
									total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun									
						Tersusunnya bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun									
									target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun									
						Terlaksananya evaluasi kinerja kemantren dan kelurahan	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	Mengukur realiasi pelaksanaan evaluasi terhadap kemantren dan kelurahan	Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi dibagi total jumlah kemantren dan kelurahan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi									
									total jumlah kemantren dan kelurahan									
						Terfasilitasinya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	Mengukur realisasi fasilitasi terhadap LKK	Jumlah LKK yang terfasilitasi dibagi total jumlah LKK dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah LKK yang terfasilitasi									
									total jumlah LKK									
		Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks reformasi hukum	indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemkot Yk					Hasil Penilaian IRH oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Nilai	AA (97,46)	AA (90 - 97.50)	AA (90 - 97.55)	AA (90 - 97.6)	AA (90 - 97.65)	AA (90 - 97,7)	AA (90 - 97.7)	AA (90 - 97.75)
									Sumber data:									
									Laporan hasil evaluasi Kemenhum & KemenHAM dengan range Kategori / Nilai-Angka/Predikat: AA / >90 - 100 / Istimewa; A / >80 - 90 / Sangat Baik; BB / >70 - 80 / Baik; B / >60 - 70 / Cukup Baik; CC / >50 - 60 / Cukup; C / >30-50 / Buruk; D / >0-30 / Sangat Buruk. (sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022)		AA (97,46)							
									Nilai Awal	**nilai**	**87,3**							
									Tingkat koordinasi	nilai	22,6							
									Kompetensi perancang	nilai	16,7							
									Kualitas re-regulasi/deregulasi	nilai	28							
									Penataan database	nilai	20							

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Nilai Apresiasi	**nilai**	**10,16**							
									Nilai Akhir	**nilai**	**97,46**							
					1.2.1.2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana	Mengukur realisasi fasilitasi penyusunan produk hukum	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									1. Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan;									
									2. Jumlah produk hukum yang diajukan									
						Terdokumentasikannya produk hukum	persentase produk hukum yang didokumentasikan	Mengukur tingkat pendokumentasian produk hukum	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dibagi total jumlah produk hukum dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									1. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan									
									2. Jumlah produk hukum yang ditetapkan									
						Terlaksananya pembudayaan hukum masyarakat	persentase sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan	Mengukur realisasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan	Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan dibagi total jumlah rencana sosialisasi/penyuluhan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :		100,00%							
									1. Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan		24							
									2. Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang direncanakan		24							
						Terfasilitasinya bantuan hukum	persentase bantuan hukum yang terfasiltasi	Mengukur realisasi fasilitasi bantuan hukum untuk internal Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah perkara masuk dibagi jumlah perkara yang difasilitasi dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :		100,00%							
									1. Jumlah perkara masuk		13							
									2. Jumlah perkara yang difasilitasi		13							
						Terfasilitasinya rencana aksi nasional HAM	nilai rencana aksi nasional HAM	Penilaian atas pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM Kota Yk	Hasil penilaian renaksi HAM oleh Kementerian HAM	nilai	96,4	90 - 96.5	90 - 96.6	90 - 96.7	90 - 96.8	90 - 96.9	96,9	97
									Sumber data :									
									Hasil penilaian Rencana Aksi HAM		96,4							
		Meningkatnya peran kerjasama daerah dalam mendukung program pembangunan	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	proporsi perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti dibandingkan dengan total perjanjian kerja sama yang telah disahkan dalam periode waktu tertentu					(Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / jumlah total PKS yg masih berlaku) x 100%	persen	99,72%	95,25%	95,93%	96%	96,50%	97%	97%	97,50%
									sumber data: aplikasi Kerja Sama Daerah pada Jogja Smart Service									
									Perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti	jumlah	356							
									Jumlah kerjasama	jumlah	357							
					1.2.1.3. Fasilitasi Kerja sama Daerah	Tersusunnya bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi	Dokumen kajian dan telaah staf yang disusun sebagai bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen kajian dan telaah staf dalam 1 tahun	dokumen	45	45	46	47	48	49	49	
									Sumber data:									
									Jumlah dokumen kajian dan telaah staf dalam 1 tahun									
						Terfasilitasinya proses kerja sama daerah	Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi	Dokumen kompilasi bukti fasilitasi kerja sama (tangkapan layar proses di layanan Kerja Sama Daerah di JSS, undangan dan notula rapat koordinasi, serta dokumen kerja	Jumlah dokumen kompilasi fasilitasi kerja sama daerah dalam 1 tahun	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	
									Sumber data:									
									Jumlah dokumen kajian dan telaah staf dalam 1 tahun									
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP	Dokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerah dalam 1 tahun	laporan	2	2	2	2	2	2	2	
									Sumber data:									
									Jumlah dokumen kajian dan telaah staf dalam 1 tahun									
	1.2.2. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	Proporsi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan Keistimewaan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Keistimewaan					Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100%	persen	56,10%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data:		56,10%							
									Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	jumlah	23							
									Total Perangkat Daerah	jumlah	41							
					1.2.2.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tersusunnya bahan kebijakan Budaya Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait Budaya Pemerintahan yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait Budaya Pemerintahan yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun									
					1.2.2.2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Tertatanya Kelembagaan Keistimewaan Kota Yogyakarta	persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	Mengukur Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaan dibagi total perangkat daerah dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaan									
									Jumlah total perangkat daerah									
	1.2.3. Penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	level atau tahapan perkembangan kapabilitas dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat kematangan ini diukur berdasarkan serangkaian indikator					Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai paramater kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	predikat	sangat tinggi (51)	sangat tinggi (51,1 - 52)	sangat tinggi (51,2 - 52,1)	sangat tinggi (51,3 - 52,2)	sangat tinggi (51,4 - 52,3)	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	sangat tinggi (51,5 - 52,4)	sangat tinggi (51,6 - 52,5)
									Sumber data:		51							

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
				yang mencerminkan berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.					Nilai total kematangan organisasi dengan rentang nilai: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1-37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19)	nilai	2091							
									Jumlah OPD	jumlah	41							
					1.2.3.1. Penataan Organisasi	Tersusunnya bahan kebijakan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun									
						Terkelolanya Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola	Mengukur kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran	Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviu dibagi total perangkat daerah dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviu									
									Jumlah total perangkat daerah									
						Terkelolanya analisis jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Mengukur Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviu dibagi total perangkat daerah dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviu									
									Jumlah total perangkat daerah									
						Tersusunnya bahan kebijakan reformasi birokrasi	Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun									
						Tersusunnya bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun									
1.3 Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	1.3.1. Penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan					Jumlah isu strategis bidang pelayanan publik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	persen	---	90%	91%	92%	93%	94%	94%	95%
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditindaklanjuti	jumlah isu	---							
									Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	jumlah isu	---							
					1.3.1.1. Penataan Organisasi	Tersusunnya bahan kebijakan pelayanan publik	persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun									
						Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	persentase Pelayanan publik yang dipantau	Mengukur pelayanan publik yang dipantau	Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatau dibagi total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatau									
									Jumlah total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat									
		Meningkatnya kualitas kebijakan administasi umum	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang					Jumlah isu strategis bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	persen	---	90%	91%	92%	93%	94%	94%	95%

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
				pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan					Sumber data:									
									Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditindaklanjuti	jumlah isu	---							
									Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	jumlah isu	---							
						Tersusunnya bahan kebijakan tatalaksana administasi umum	persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait tatalaksana administrasi umum yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait tatalaksana administrasi umum yang disusun dikali 100 persen	persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun									
									Jumlah target bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun									
		Meningkatnya kualitas layanan umum dan keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan umum dan keprotokolan yang disediakan oleh Bagian Umpro.					Nilai hasil survey responden pengguna layanan di Bagian Umpro		81,53 (Baik)	81,60 (Baik)	81,70 (Baik)	81,80 (Baik)	81,90 (Baik)	82,00 (Baik)	82,00 (Baik)	82,10 (Baik)
									Sumber data :									
									Hasil survey responden pengguna layanan di Bagian Umpro dengan 9 unsur pelayanan, yaitu : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Wkt yg diperlukan dlm menyelesaikan pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi hasil pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan aduan, saran dan masukan 9. Ketersediaan sarpras	nilai	81,53						
					1.3.1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli	persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi	Mengukur terfasilitasinya layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli.	Jumlah layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang difaslitasi dibagi total layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :		100,00%							
									Jumlah layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang difaslitasi	layanan	8							
									total layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli	layanan	8							
					1.3.1.3.. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan Setda	persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi	Mengukur terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah.	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang difasilitasi dibagi total paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :		100,00%							
									Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang difasilitasi	paket	46							
									total paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah	paket	46							
					1.3.1.4. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	Mengukur terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.	Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan dibagi total jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :		100,00%							
									Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	laporan	36							
									total jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	laporan	36							
1.4 Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	1.4.1.Penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda	Nilai AKIP Setda	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)*					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (84,47)	A (84,00 - 84,25)	A (84,47 - 84,50)	A (84,50 - 84,75)	A (84,75 - 85,00)	A (85,00 - 85,25)	A (85,00 - 85,25)	A (85,25 - 85,50)
									Sumber data:		84,47							
									LHE SAKIP dari Inspektorat									
									1. Perencanaan kinerja	Nilai	29,53							
									2. Pengukuran kinerja	Nilai	26,84							
									3. Pelaporan kinerja	Nilai	13,66							
									4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai	14,44							
			Nilai SPIP Setda	Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤					Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat		Optimum (4,739)	Optimum (4,740 - 5)	Optimum (4,741 - 5)	Optimum (4,742 - 5)	Optimum (4,743 - 5)	Optimum (4,744 - 5)	Optimum (4,744 - 5)	Optimum (4,745 - 5)
									Sumber data:									
									LHE SPIP dari Inspektorat									
									1. Penetapan tujuan	Skor	2,000							
									2. Struktur & proses	Skor	1,239							
									3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP	Skor	1,500							
									Nilai maturitas SPIP Setda	**Skor**	**4,739**							
			Nilai IKM Setda	Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Sekretariat Daerah dengan predikat: Sangat baik (88,31 - 100) Baik (76,61 - 88,30) Kurang baik (65,00 - 76,60) Tidak baik (25,00 - 64,99)					Rata-rata nilai IKM Bagian di Setda		Baik (85,73)	Baik (85,00 - 88,30)	Baik (85,10 - 88,30)	Baik (85,20 - 88,30)	Baik (85,30 - 88,30)	Baik (85,40 - 88,30)	Baik (85,40 - 88,30)	Baik (85,50 - 88,30)
									Sumber data:		85,73							
									IKM Kesra	indeks	88,53							
									IKM Tapem	indeks	87,73							
									IKM hukum	indeks	86,84							
									IKM PKD	indeks	86,28							
									IKM Adpem	indeks	87,07							

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Target 2030
												2025	2026	2027	2028	2029			
									IKM BPBJ	indeks	82,93								
									IKM Bagor	indeks	85,68								
									IKM Umpro	indeks	82,35								
									IKM Admkeu	indeks	84,17								
					1.4.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen PEP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen PEP yang seharusnya disusun dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data :		100,00%								
									Dokumen PEP yang disusun tepat waktu	dokumen	10								
									DOkumen PEP yang seharusnya disusun tepat waktu	dokumen	10								
						Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	Mengukur ketersediaan dokumen statistik sektoral	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data :										
									Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan		9								
									Jumlah Data statistik sektoral		9								
					1.4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	"Mengukur kualitas laporan keuangan P	"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD "	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data										
									"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD"										
					1.4.1.3. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	"Mengukur kualitas laporan keuangan P	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:										
									"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD"										
					1.4.1.4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	"Mengukur kualitas laporan keuangan P	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD										
					1.4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	"Mengukur kualitas laporan keuangan P	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:										
									"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD "										
					1.4.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	"Mengukur kualitas laporan keuangan P	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber data:										
									"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Setda oleh BPKAD "										
					1.4.1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan,	Hasil nilai IP ASN Setda	indeks	86,28	86,30	86,32	86,34	86,36	86,38	86,38	86,40
									Sumber data:										
									Hasil nilai IP ASN Setda										
					1.4.1.8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	nilai	81,74	81,80	81,90	82,00	82,10	82,20	82,20	82,30
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum										
					1.4.1.9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	mengukur jumlah paket pengadaan yang seharusnya diumumkan melalui aplikasi SiRUP pada periode tertentu	Jumlah belanja Setda yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Setda dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data :										
									Jumlah belanja Setda yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah									
									Jumlah belanja pada DPA Setda	Rupiah									
1.5 Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	1.5.1. Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai upaya penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan ekonomi kreatif, dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu					Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan data internal dari Bag PKD x 100%	persen	---	82,35%	88,24%	90,00%	90,91%	91,67%	91,67%	92,31%
									sumber data:	jumlah isu	---	14	15	9	10	11	11	12
									Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti	jumlah isu	---	17	17	10	11	12	12	13
									Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan data internal di Bag PKD										
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu						Jumlah isu strategis terkait BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	persen	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data:										
									Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	isu	---	2	2	2	2	2	2	2
									Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	isu	---	2	2	2	2	2	2	2
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	proporsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan laporan					Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan aspek keuangan dan non keuangan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	persen	80,77%	84,62%	88,46%	92,31%	92,31%	96,15%	96,15%	100,00%

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
												2025	2026	2027	2028	2029		
				keuangan, operasional, dan/atau laporan kinerja lainnya, dibandingkan dengan total BUMD dan BLUD yang ada dalam periode waktu tertentu.					sumber data:	laporan kinerja	2	2	2	2	2	3	3	3
									Laporan BUMD kategori baik	laporan kinerja	19	20	21	22	22	22	22	23
									Laporan BLUD kategori baik	unit	3	3	3	3	3	3	3	3
									Total BUMD	unit	23	23	23	23	23	23	23	23
									Total BLUD									
					1.5.1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang diambil dari dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diambil dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang diambil dari Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan		dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan kepariwisataan	Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	dokumen								
						Tersusunnya bahan kebijakan Pembiayaan Keuangan Usaha Mikro	Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang diambil dari Dokumen laporan realisasi penyaluran KUR	Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang diambil dari dokumen bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan BUMD	Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan BUMD yang disusun	Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan BLUD	Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan BLUD yang disusun	Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun	dokumen	---	1	1	1	1	1	1	1
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun	dokumen		1	1	1	1	1	1	
						Terlaksananya pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan	Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan	BUMD	---	3	3	3	3	3	3	3
									Sumber data:									
									Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan	BUMD		3	3	3	3	3	3	3
						Terlaksananya pembinaan BLUD	Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan	Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan dibagi total BLUD dikali 100 persen	Persen	---	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan	BLUD		23	23	23	23	23	23	23
									total BLUD	BLUD		23	23	23	23	23	23	23
1.6 Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	1.6.1. Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	proporsi kegiatan pembangunan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total kegiatan pembangunan yang direncanakan					Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	Persen	98,54	98,57	98,60	98,63	98,66	98,69	98,69	98,72
									Sumber data:									
									SIM Pelaporan	Persen	98,54	98,57	98,60	98,63	98,66	98,69	98,69	98,72
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan					Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	Persen	89	90	91	92	93	94	94	95
									Sumber data:									
									Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Isu	5	5	5	5	5	5	5	5
									Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Isu	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.6.1.1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya bahan kebijakan isu strategis	Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan isu strategis yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun dikali 100 persen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
									Target bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
						Tersusunnya bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan	Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun dikali 100 persen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
												2025	2026	2027	2028	2029		
									Jumlah bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Target bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
						Tersusunnya bahan kebijakan pembangunan infrastruktur	Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun dikali 100 persen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
									Target bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
						Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	Mengukur realisasi pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan	Jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	Paket Strategis	10	8	10	10	10	10	10	10
									Jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang direncanakan	Paket Strategis	10	8	10	10	10	10	10	10
						Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana	Mengukur realisasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan	Jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data:									
									Jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
									Jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
		Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan	indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengadaan barang dan jasa pada Pemkot Yk. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas kebijakan tatakelola pengadaan pada Pemkot Yk *draft :* *Hasil penilaian tata kelola pengadaan oleh LKPP diperoleh dari perhitungan total nilai Indikator pemanfaatan sistem pengadaan, Indikator kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan Indikator tingkat kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa)*					Hasil penilaian tata kelola pengadaan oleh LKPP	nilai	84,21	84,5	85	85,5	86	86,5	86,5	87
									Sumber data:									
									Indikator pemanfaatan sistem pengadaan	nilai								
									Indikator kualifikasi & kompetensi SDM PBJ	nilai								
									Indikator tingkat kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa)	nilai								
									Total nilai	nilai								
					1.6.1.2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun	Mengukur realisasi bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun	Jumlah bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun dibagi target bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun									
									Target bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun									
						Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan dikali 100 persen									
									Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan									
						Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Persentase pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa	Mengukur realisasi pelaksanaan pengadaan tender	Jumlah tender yang dilaksanakan dibagi jumlah tender yang direncanakan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah tender yang dilaksanakan									
									Jumlah tender yang direncanakan									
						Terlaksananya pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	Persentase monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terlaksana	Mengukur realisasi pelaksanaan monev SPSE	Jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan dibagi jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang direncanakan dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
												2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan									
									Jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang direncanakan									

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD
KOTA YOGYAKARTA

2025 2029

(0274) 540650
(0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 telah tersusun.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yangakan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.I.P
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197106301996031003

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Dafta Gambar v
Bab I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD 6
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD 10
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 17
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 21
2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 21
2.7 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 22
2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN 25
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 25
3.2 Strategis dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 26

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 31
4.1 Uraian Program 31
4.2 Uraian Kegiatan 32
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan PAgu Indikatif 34
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pambangunan Daerah 61
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Utama Kunci (IKU) Sekretariat DPRD 62
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 63
Bab V PENUTUP 64
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Yk per Juli Tahun 2025 11
Tabel 2.2 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan 15
Tabel 2.3 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselon 15
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 19
Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 23
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 26
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 30
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 30
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 35
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta 36
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 41
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra 61
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD 2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025 - 2029 dari aspek unsur pendukung urusan pemerintahan dengan memberikan Gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta,

b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025 - 2029,
c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta,
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun,
e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan,
f. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dan menyajikan kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD.

Disamping itu pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdiri atas :

a. Bagian Administrasi Umum, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Ketua Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
   1. Ketua Tim Kerja Kajian Perundang Undangan
   2. Ketua Tim Kerja Persidangan dan Risalah
   3. Ketua Tim Kerja Humas Protokol dan Publikasi
c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
   1. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran
   2. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan
   3. Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi
d. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam tim kerja. Setiap jabatan fungsional tim kerja dapat dibentuk Ketua Tim Kerja Jumlah Ketua Tim Kerja ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka ketugasan kelompok jabatan fungsional dan tim kerja dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun Tugas Organisasi yang ada pada masing-masing bagian di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Bagian Administrasi Umum

   Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

   1. pengoordinasian perencanaan program pada kerja Bagian Administrasi Umum;
   2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis Bagian Administrasi Umum;
   3. pengoordinasian pelaksanaan program Bagian Administrasi Umum;
   4. membantu Sekretaris DPRD dalam pengoordinasia program kerja bagian dan sub bagian;
   5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
   6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat DPRD;
   7. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
   8. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Sekretariat DPRD;

9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat DPRD;
10. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Sekretariat DPRD;
11. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
12. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Umum;
13. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Administrasi Umum;
15. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Umum; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

1. pengordinasian perencanaan program kerja pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
2. pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
3. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengkajian perundang-undangan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan persidangan dan penyusunan risalah;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kehumasan, protokol dan publikasi;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas,

ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;

10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Persidangan dan Perundang- undangan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

1. pengordinasian perencanaan program kerja pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
2. pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
3. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
4. pengoordinasian penyelengggaraan kegiatan fasilitasi penganggaran;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengawasan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan penyerapan aspirasi;
7. pengoordinasian pengelolaaan data dan informasi pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dapat digambarkan pada bagan berikut ini.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

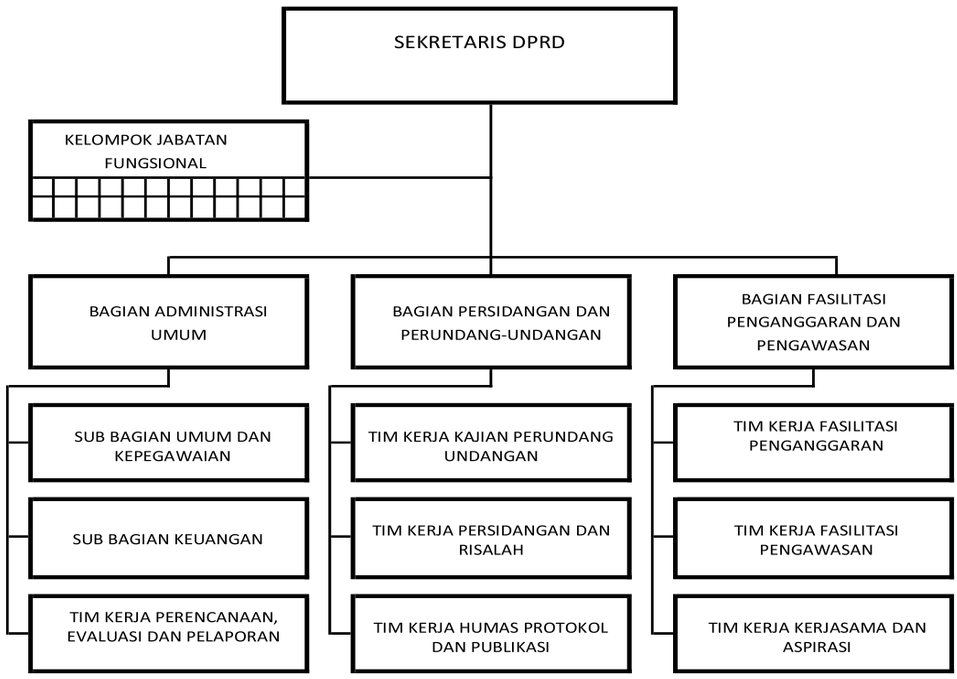

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

a. Sumber Daya Pegawai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta bahwa Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu jabatan struktural yang terdiri tiga Kepala Bagian, dua Kepala Sub Bagian, tujuh Sub Koordinator, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum (Staf). Disamping itu untuk kelompok jabatan fungsional tertentu juga belum terisi.

Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Bulan Juli 2025 sebanyak 92 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta per Juli Tahun 2025

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
1		Sekretaris DPRD	S1 semua jurusan diutamakan S2 Manajemen/ S2 Administrasi Publik/ S2 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan/ S2 Hukum/ S2 Magister Ekonomika Pembagunan/ S2 Magister Studi Kebijakan/S2 yang serumpun	1	-	-	-	-
2		Kepala Bagian Adm. Umum	S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Administrasi Publik/ S2 Administrasi Negara/ S2 yang serumpun	1	S1	1	1	-
3		Kepala Sub Bagian Kepegawaian	S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Pemerintahan, S1	1	S2	1	1	-
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma	2	S1	1	-	1
	b)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	22	SMP & SMA	2	2	-
	c)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	3	SMA & D3	2	1	1
	d)	Penata Layanan Operasional	SLTA Sederajat	5	SMA	2	2	-

4		Kepala Subbagian Keuangan	S1 Ekonomi diutamakan S2 Manajemen/ S2 Akuntansi/ S2 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan / S2 Administrasi Publik/ S2 yang serumpun	1	S1	1	-	1
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	1	S1 & S2	2	-	2
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	4	D3 & S1	2	1	1
	c)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	S1	1	-	1
5		Rumpun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	1	-	-	-	-
	b)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	-	-	-	-
		Kelompok Jabatan Fungsional						
	a)	Perencana Ahli Muda	Sarjana (S1) atau Diploma IV Rumpun Ilmu Humaniora, Rumpun Ilmu Sosial, Rumpun Ilmu Alam, Rumpun Ilmu Formal, Rumpun Ilmu Terapan, atau Rumpun lainnya, sesuai dengan kebutuhan di bidang perencanaan pembangunan	1	S1	1	-	1
6		Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	S1 Hukum, S1 Sospol diutamakan S2 Ilmu Hukum/ S2 yang serumpun	1	S1	1	1	-

7		Rumpun Persidangan dan Risalah						
	a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	-	-	-	-
8		Rumpun Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	2	S1	1	-	1
	b)	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	2	-	-	-	-
	c)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	2	-	-	-	-
9		Rumpun Kajian Perundang-undangan						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	2	S1	1	-	1
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	1	-	-	-	-
		Kelompok Jabatan Fungsional						
	a)	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sarjana (S1) atau Diploma IV	1	S1	1	1	-
	b)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) di bidang Komunikasi.	1	-	-	-	-
	c)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum	3	S1	3	3	-

10		Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan	S1 Ekonomi, S1 Sospol diutamakan S2 Manajemen/ S2 Akuntansi/ S2 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan / S2 Administrasi Publik/ S2 yang serumpun	1	S1	1	-	1
11		Rumpun Fasilitasi Penganggaran						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	1	S1	1	1	-
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	1	-	-	-	-
	c)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	-	-	-	-
12		Rumpun Fasilitasi Pengawasan						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	1	S1	1	-	1
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	1	S1	1	1	-
	c)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	-	-	-	-
13		Rumpun Kerjasama dan Aspirasi						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	1	-	-	-	-
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	1	SMA	1	-	1
	c)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1	-	-	-	-
		Kelompok Jabatan Fungsional						
	a)	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sarjana (S1) atau Diploma IV	3	S1 & S2	3	-	3
14		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						

	a)	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) di bidang Ekonomi, Manajemen, Hukum, Ilmu Administrasi, atau Ilmu Sosial	1	S1	1	1	-
	b)	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Diploma III (D-III) di bidang Ekonomi, Manajemen, Ilmu Administrasi, atau Ilmu Sosial	2	D3	2	1	1
	c)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) di bidang Komunikasi.	1	S1	1	-	1
	d)	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum	1	S1	1	1	-
	JUMLAH			83		36	18	18

Kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta belum memadai, karena sesuai Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 83 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 36 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 47 pegawai. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan pegawai yang ada terendah adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 1 pegawai, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 5 pegawai, D3 sebanyak 4 pegawai, S1 sebanyak 23 pegawai, dan tertinggi adalah S2 sebanyak 3 pegawai, Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan sama yaitu sebanyak 18 orang atau masing-masing 50 % dari jumlah total pegawai yang ada.

Tabel 2.2
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	3
2	III	24
3	II	4
4	I	-
5	PPPK	5

Tabel 2.3
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	3
4	IV	2
5	Jabatan Fungsional	13
6	Jabatan Pelaksana	18

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang ideal didukung oleh 83 Pegawai, yaitu terdiri dari 6 (enam) Pejabat Struktural, 7 (tujuh) Ketua Tim Kerja (Pejabat Fungsional), 9 (sembilan) Fungsional Tertentu, dan 61 (enam puluh satu) Fungsional Umum. Tetapi sampai dengan bulan Juli tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Namun dengan kondisi SDM yang ada, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan tenaga teknis non PNS dalam pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini sarana prasarana pendukung yang tersedia berupa :

1) Bangunan Gedung

a) Gedung Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Adapun gedung Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berada di belakang gedung DPRD Kota Yogyakarta, dengan luas bangunan ± 952 m^2 yang terdiri dari dua lantai. Adapun gedung Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan PC Komputer, AC, telepon, TV, dan monitor CCTV
- Ruang Kerja Kepala Bagian dilengkapi dengan AC dan Interphone
- Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dilengkapi AC
- Ruang Kerja Ketua Tim Kerja dilengkapi AC
- Ruang Kerja Staf dilengkapi AC dan Interphone
- Ruang Kerja Komputer dilengkapi AC
- Ruang Rapat dilengkapi AC dan TV Smartboard
- Gudang
- WC/Urinoir
- Tempat Parkir kendaraan bermotor
- Tempat Parkir Kendaraan tidak bermotor

b) Gedung DPRD Kota Yogyakarta

Adapun gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m^2, yang terdiri dari tiga lantai. Adapun gedung DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1

  Lantai Dasar terdiri dari beberapa ruangan antara lain :
  - Ruang Lobby
  - Ruang Rapat I dilengkapi AC, TV Smartboard (RDPU / Dialog Warga / Penerimaan Tamu)
  - Ruang Fraksi dilengkapi AC, interphone
  - WC/Urinoir
- Lantai 2
  - Ruang Lobby

- Ruang Pimpinan dilengkapi AC, PC Komputer, TV, telephone dan WC
- Ruang Fraksi dilengkapi AC, interphone
- Ruang Rapat Alat Kelengkapan dilengkapi AC, TV Smartboard (Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan)
- Ruang Pers
- Ruang Podcast
- Ruang Kesehatan / Operator
- WC/Urinoir

➢ Lantai 3

- Ruang Rapat Paripurna
- WC/Urinoir

2) Sarana Komunikasi dan Transportasi

a) Kendaraan bermotor

- Kendaraan Sekretariat
  - 9 Kendaraan roda empat
  - 5 Minibus
  - 14 kendaraan roda dua

b) Sarana Komunikasi

- Laptop : 61 Unit
- Komputer PC : 69 Unit
- Note Book : 6 Unit
- IPAD/TABLET : 22 Unit
- Handy Talky : 10 Unit
- Telephon. Interphone, faximile dan internet

c) Sarana Pendukung Lainnya

- Generator/Genset : 2 Unit
- Kamera CCTV : 2 Unit
- Kamera Foto : 15 Unit (3 rusak)
- Televisi : 14 Unit
- TV Smartboard : 4 Unit
- TV Wall : 4 Set (28 Unit)
- Stand Thermogun : 5 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta (2023 – 2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan target kinerja. Pencapaian target sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta selalu tercapai bahkan melebihi dari target. Adapun formula

penghitungannya adalah nilai survey kepuasaan anggota DPRD. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR SASARAN																	
	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	Persen	73	77	78	78.2	79.5	78.10	78.14	80.63	79.63	85,7	106.98%	101.48%	103.37%	103.11%	101.40 %
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai															
INDIKATOR PROGRAM																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang diselesaikan			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
Persentase Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																	
Persentase Produk			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hukum yang diselesaikan																
Persentase Pembahasan Pengganggaran yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan			-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	94,69%	50%	-	-	100%	94,69%	50%
Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang diselesaikan			-	-	100%	100%	100%	-	-	80%	100%	100%	-	-	80%	100%	100%

Dari tabel 2.4 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja utama Sekretgariat DPRD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, meskipun realisasi dari tahun ke tahun ada yang turun kemudian naik lagi. Hal ini disebabkan karena capaian indicator sasaran daerah indicator sasaran perangkat daerah dan indicator program perangkat daerah Sekretariat DPRD ada tercapai dan ada yang tidak tercapai sehingga mempengaruhi kinerja utama Sekretariat DPRD. Selain itu juga ada beberapa indicator program, formula indicator program dan sumber data yang mengalami perubahan atau reviu.

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Layanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada kelompok sasaran antara lain :

a. DPRD Kota Yogyakarta;
b. Mitra Komisi DPRD Kota Yogyakarta yaitu OPD;
c. Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD daerah lain;
d. Masyarakat / pencari informasi.

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan ada beberapa perangkat daerah dengan crosscutting Sekretariat DPRD dengan OPD yaitu :

a. Pemerintah Kota Yogyakarta
   Dukungan terkait usulan raperda dari eksekutif
b. Bagian Hukum
   Dukungan terkait pembahasan raperda
c. BPKAD
   Dukungan terkait pembahasan anggaran (anggaran tahun sebelumnya, anggaran tahun berjalan dan anggaran tahun depan), penatausahaan dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, inventarisasi barang
d. Bappeda
   Dukungan terkait pokok-pokok pikiran DPRD yang diinput ke dalam SIPD RI, rencana kerja tahunan / 5 tahunan
e. BKPSDM
   Dukungan terkait administrasi kepegawaian
f. Bagian Pengadaan Barang Jasa
   Dukungan terkait pengadaan barang jasa
g. Bagian Umum dan Protokol
   Dukungan terkait pelaksanaan rapat paripurna
h. Bagian Perekonomian dan Kerjasama
   Dukungan terkait kerjasama daerah

2.6 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tidak ada, namum demikian Sekretariat DPRD memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam rangka koordinasi dengan BUMD yaitu PDAM dan Bank Jogja.

2.7 KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan public melalui serangkaian kerja sama. Dalam hal ini Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian dan Kerjasama terkait kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta baik dengan daerah lain bahkan kerjasama dengan pemerintah luar negeri yang perlu pengawasan oleh DPRD Kota Yogyakarta.

2.8 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kota Yogyakarta, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang teridentifikasi antara lain :

1. Belum sesuainya Peraturan Walikota yang mengatur Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan Peraturan yang lebih tinggi,
2. Agenda kegiatan DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD,
3. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan.

b. Isu strategis perangkat daerah

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa dating dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Sekretariat DPRD berdasarkan tugas dan fungis serta hasil dari rumusan masalah yang ada Adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan tugas fungsi DPRD dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah;
2. Pengembangan website DPRD dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan DPRD;
3. Partisipasi dan keterlibatan KANWIL KUM DIY dalam proses penyusunan NA Raperda sampai dengan ditetapkan;
4. Sinkronisasi dan harmonisasi proses penyusunan Propemperda;
5. Sinkronisasi penyusunan Renja DPRD dengan proses penyusunan Renja OPD.

Isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta meskipun tidak langsung berkaitan dengan lingkungan fisik (air, udara, tanah), isu-isu ini berpengaruh pada daya dukung sosial dan tata kelola pemerintahan yang mendukung keberlanjutan. Teknis menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum sesuainya Peraturan Walikota yang mengatur Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dengan Peraturan yang lebih tinggi	Belum sesuainya Perwal yang mengatur Tusi Set. DPRD berdampak pada kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Penyelarasan tugas fungsi DPRD dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah

	Agenda kegiatan DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD	Kegiatan DPRD yang dinamis berdampak pada penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Partisipasi dan keterlibatan KANWIL KUM DIY dalam proses penyusunan NA Raperda sampai dengan ditetapkan
						Sinkronisasi dan harmonisasi proses penyusunan Propemperda
						Sinkronisasi penyusunan Renja DPRD dengan proses penyusunan Renja OPD
	Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan	Belum sesuainya kuantitas dan kualitas SDM berdampak pada kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Pengembangan website DPRD dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan DPRD

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Baik tujuan maupun sasaran keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Bappeda dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kinerja DPRD secara Optimal	Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persentase)	92,54	93,76	94,60	95,22	95,68	97,55
	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD Yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD (Nilai)	A (85 – 89)	A (86 - 89)	A (86,2 - 89)	A (86,4 - 89)	A (86,6 - 89)	A (86,8 - 89)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indicator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui Tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud sebagai berikut :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD											
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal		Indeks kepuasan fasilitasi DPRD (Nilai)	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	
		Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persentase)	88,33	92,54	93,76	94,60	95,22	95,68	97,55	
		Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

Tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD secara umum adalah "Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kinerja DPRD Secara Optimal". Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Secara lebih spesifik indikator tersebut diformulasi sebagai berikut :

Komposit = 30% fasilitasi dokumen perda + 30% fasilitasi dokumen penganggaran + 25% fasilitasi tindaklanjut pengawasan DPRD + 15% pemenuhan kebutuhan fasilitasi agenda DPRD

Kondisi awal di tahun 2025 dari Indeks Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar 92,54%. Dalam konteks perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2029 adalah sebesar 95,68%. Dengan demikian dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan, sehingga indikator mencapai 95,68% di tahun terakhir Renstra.

Kemudian untuk sasaran perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Adaptif dengan indikator sasaran yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD. Kondisi awal dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah A (85), target akhir yang dicapai pada tahun 2029 adalah A (86,6 – 89). Dengan demikian dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan target A akan tercapai di setiap tahunnya sampai di tahun terakhir Renstra.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sektretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, yaitu "Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Adaptif". Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi

   Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

   a. Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
   b. Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
   c. Terselenggaranya kajian perundang undangan
   d. Terlaksananya penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik
   e. Terlaksananya penyusunan tata tertib DPRD
   f. Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting

   Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

   a. Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS
   b. Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
   c. Terlaksananya pembahasan APBD
   d. Terlaksananya pembahasan APBD perubahan
   e. Terlaksananya pembahasan laporan semester
   f. Terlaksananya pembahasan pertangunggjawaban APBD

3. Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan

   Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

   a. Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
   b. Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur

c. Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
d. Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
e. Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
f. Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran
g. Terselenggaranya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD

   Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

   a. Terlaksananya pendalaman tugas DPRD
   b. Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli
   c. Tersedianya tenaga ahli fraksi
   d. Terselenggaranya program kerja DPRD
   e. Terselenggaranya hubungan komunikasi dengan Masyarakat
   f. Terpublikasi dan terdokumentasinya Dewan
   g. Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD
   h. Terlaksananya reses
   i. Tersusunnya kode etik DPRD
   j. Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD
   k. Terlaksananya fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah
   l. Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi
   m. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
   n. Tersusunnya laporan kinerja DPRD
   o. Terlaksananya fasilitasi tugas Badan Musyawarah
   p. Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD

5. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

   Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

   a. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
   b. Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   e. Tersususnnya dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   f. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
   h. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

i. Tersususnnya dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
j. Tersusunnya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
k. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
l. Tersusunnya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
m. Tersusunnya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
n. Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
o. Tersusunnya perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
p. Tersusunnya dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD
q. Tersusunnya laporan penilaian barang milik daerah SKPD
r. Tersusunnya rekonsiliasi laporan barang milik daerah pada SKPD
s. Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
t. Tersusunnya dokumen pemanfaatan barang milik daerah SKPD
u. Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
v. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
w. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
x. Tersedianya peralatan rumah tangga
y. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
z. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
aa. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
bb. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
cc. Tersedianya laporan jasa surat menyurat
dd. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
ee. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
ff. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
gg. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
hh. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
ii. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya
jj. Terselenggaranya administrasi keuangan DPRD
kk. Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD
ll. Terlaksananya medical check up DPRD
mm. Terselenggaranya administrasi keanggotaan DPRD
nn. Terfasilitasinya fraksi DPRD
oo. Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
pp. Tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD

Disamping itu langkah selanjutnya Adalah penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi
Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting
Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD

Arah dan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi - Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting - Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui Tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 URAIAN PROGRAM

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD didukung oleh program-program sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*

   Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat *supporting* atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 kegiatan yang diampu oleh Bagian Administrasi Umum dan Bagian Persidangan dan Perundang Undangan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dan Layanan Administrasi DPRD.

2. *Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*

   Program yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang berarti DPRD berperan membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah, membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD serta kebijakan pemerintah daerah. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan yang tersebar di 3 bagian yakni Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan Bagian Administrasi Umum yaitu Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan

dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta antara lain :

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. *Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

10. *Layanan Administrasi DPRD*

    Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, Fasilitasi Fraksi DPRD, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

11. *Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*

    Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD, Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

12. *Pembahasan Kebijakan Anggaran*

    Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

13. *Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*

    Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan, Pengawasan Penggunaan Anggaran, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

14. *Peningkatan Kapasitas DPRD*
    Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Pendalaman Tugas DPRD, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD, Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

15. *Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*
    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses.

16. *Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*
    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Kode Etik DPRD, Pengawasan Kode Etik DPRD.

17. *Pembahasan Kerja Sama Daerah*
    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah, Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

18. *Fasilitasi Tugas DPRD*
    Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indicator kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					87.986.158.968,00		89.775.739.133,00		92.054.414.422,00		94.556.973.045,00		97.813.080.210,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.465.424.218,00		39.247.785.456,00		40.243.967.272,00		41.338.025.476,00		42.761.516.908,00	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Seketariat DPRD (Predikat)	A	A	A	38.465.424.218,00	A	39.247.785.456,00	A	40.243.967.272,00	A	41.338.025.476,00	A	42.761.516.908,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai SPIP Sekretariat DPRD (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai IKM Sekretariat DPRD (Nilai)	85,33	86,00	86,67		87,00		87,67		88,00		88,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					49.520.734.750,00		50.527.953.677,00		51.810.447.150,00		53.218.947.569,00		55.051.563.302,00	
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu (Persentase)	100	77,78	81,82	11.327.809.000,00	84,62	10.823.543.677,00	86,67	11.231.577.150,00	88,24	12.048.827.569,00	94,44	13.275.368.302,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi (Persentase)	100	100	100	3.167.995.000,00	100	3.330.000.000,00	100	3.480.250.000,00	100	3.630.500.000,00	100	3.780.575.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi (Persentase)	100	98,08	98,08	10.510.259.000,00	98,08	11.549.995.000,00	98,08	12.125.000.000,00	98,08	12.400.000.000,00	98,08	12.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD (Persentase)	85,42	97,92	98	24.514.671.750,00	98	24.824.415.000,00	98	24.973.620.000,00	97,96	25.139.620.000,00	98	25.295.620.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
TOTAL KESELURUHAN					87.986.158.968.00		89.775.739.133.00		92.054.414.422.00		94.556.973.045.00		97.813.080.210.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD							
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal				Indeks kepuasan fasilitasi DPRD (Nilai)		
		Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persentase)		
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi		Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
						Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	
						Sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting		Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran secara tepat waktu	Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan APBD Perubahan	
						Pembahasan Laporan Semester	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan		Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	

						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
						Penagawasan Penggunaan Anggaran	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD		Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Pendalaman Tugas DPRD	
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Meningkatnya keselarasan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja DPRD	Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
						Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
						Pelaksanaan Reses	
				Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
						Penyusunan Kode Etik DPRD	
						Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dibahas (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
						Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
		Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD (Predikat)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai SPIP Sekretariat DPRD (Predikat)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Sekretariat DPRD (Nilai)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD 2. Jumlah ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat DPRD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai penguatan keuangan dan aset Sekretariat DPRD	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Sekretariat DPRD	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat DPRD	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD	Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
						Fasilitasi Fraksi DPRD	
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program / kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				71.881.059.890		87.986.158.968		89.775.739.133		92.054.414.422		94.556.973.045		97.813.080.210		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				39.666.450.640		38.465.424.218		39.247.785.456		40.243.967.272		41.338.025.476		42.761.516.908		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Seketariat DPRD (Predikat)	A	A		A		A		A		A		A		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Nilai SPIP Sekretariat DPRD (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai IKM Sekretariat DPRD (Nilai)	85,33	86		86,67		87		87,67		88		88,67			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				74.688.000		86.069.660		107.587.076		110.276.750		113.033.667		115.859.504		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	74.688.000	4	86.069.660	4	107.587.076	4	110.276.750	4	113.033.667	4	115.859.504		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.460.000		10.900.000		13.625.000		13.965.625		14.314.765		14.672.634	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	10.460.000	4	10.900.000	4	13.625.000	4	13.965.625	4	14.314.765	4	14.672.634	
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.551.000		4.551.000		5.688.750		5.830.968		5.976.742		6.126.160	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.551.000	1	4.551.000	1	5.688.750	1	5.830.968	1	5.976.742	1	6.126.160	
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.551.000		4.551.000		5.688.750		5.830.968		5.976.742		6.126.160	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.551.000	1	4.551.000	1	5.688.750	1	5.830.968	1	5.976.742	1	6.126.160	
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.420.000		4.462.830		5.578.538		5.718.001		5.860.951		6.007.474	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.420.000	1	4.462.830	1	5.578.538	1	5.718.001	1	5.860.951	1	6.007.474	
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.420.000		4.462.830		5.578.538		5.718.001		5.860.951		6.007.474	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.420.000	1	4.462.830	1	5.578.538	1	5.718.001	1	5.860.951	1	6.007.474	
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				46.906.000		55.302.000		69.127.500		70.855.687		72.627.079		74.442.755	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	24	46.906.000	24	55.302.000	24	69.127.500	24	70.855.687	24	72.627.079	24	74.442.755	
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.380.000		1.840.000		2.300.000		2.357.500		2.416.437		2.476.847	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.380.000	4	1.840.000	4	2.300.000	4	2.357.500	4	2.416.437	4	2.476.847		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.189.866.000		6.244.124.283		7.474.263.750		7.661.120.343		7.852.648.348		8.048.964.554		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	6.189.866.000	12	6.244.124.283	12	7.474.263.750	12	7.661.120.343	12	7.852.648.348	12	8.048.964.554		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45		45		45		45		45		45			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.164.566.000		6.232.024.283		7.442.638.750		7.628.704.718		7.819.422.335		8.014.907.893		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	6.164.566.000	45	6.232.024.283	45	7.442.638.750	45	7.628.704.718	45	7.819.422.335	45	8.014.907.893		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.800.000		6.600.000		17.250.000		17.681.250		18.123.281		18.576.363		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	13.800.000	3	6.600.000	3	17.250.000	3	17.681.250	3	18.123.281	3	18.576.363		
4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.600.000		2.200.000		5.750.000		5.893.750		6.041.093		6.192.120		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	5	4.600.000	5	2.200.000	5	5.750.000	5	5.893.750	5	6.041.093	5	6.192.120		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				460.000		220.000		575.000		589.375		604.109		619.211		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	460.000	1	220.000	1	575.000	1	589.375	1	604.109	1	619.211		
4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.380.000		660.000		1.725.000		1.768.125		1.812.328		1.857.636		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1.380.000	1	660.000	1	1.725.000	1	1.768.125	1	1.812.328	1	1.857.636		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.600.000		2.200.000		5.750.000		5.893.750		6.041.093		6.192.120		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	4.600.000	12	2.200.000	12	5.750.000	12	5.893.750	12	6.041.093	12	6.192.120		
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				460.000		220.000		575.000		589.375		604.109		619.211		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	575.000	1	589.375	1	604.109	1	619.211		
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.580.000		6.600.000		17.250.000		17.681.250		18.123.280		18.576.360		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	10.580.000	12	6.600.000	12	17.250.000	12	17.681.250	12	18.123.280	12	18.576.360		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				920.000		660.000		1.725.000		1.768.125		1.812.328		1.857.636		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	660.000	1	1.725.000	1	1.768.125	1	1.812.328	1	1.857.636		
4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				920.000		660.000		1.725.000		1.768.125		1.812.328		1.857.636		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	660.000	1	1.725.000	1	1.768.125	1	1.812.328	1	1.857.636		
4.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				920.000		660.000		1.725.000		1.768.125		1.812.328		1.857.636		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	920.000	1	660.000	1	1.725.000	1	1.768.125	1	1.812.328	1	1.857.636		
4.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.450.000		1.980.000		5.175.000		5.304.375		5.436.984		5.572.908		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.450.000	12	1.980.000	12	5.175.000	12	5.304.375	12	5.436.984	12	5.572.908		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.450.000		1.980.000		5.175.000		5.304.375		5.436.984		5.572.908		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3.450.000	1	1.980.000	1	5.175.000	1	5.304.375	1	5.436.984	1	5.572.908		
4.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				920.000		660.000		1.725.000		1.768.125		1.812.328		1.857.636		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000	1	660.000	1	1.725.000	1	1.768.125	1	1.812.328	1	1.857.636		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.990.000		5.100.000		6.375.000		6.534.375		6.697.734		6.865.177		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	2.990.000	1	5.100.000	1	6.375.000	1	6.534.375	1	6.697.734	1	6.865.177		
4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.990.000		5.100.000		6.375.000		6.534.375		6.697.734		6.865.177		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	2.990.000	1	5.100.000	1	6.375.000	1	6.534.375	1	6.697.734	1	6.865.177		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.326.048.015		1.647.252.850		2.380.195.744		2.439.700.636		2.500.693.149		2.563.210.475		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1.326.048.015	2	1.647.252.850	2	2.380.195.744	2	2.439.700.636	2	2.500.693.149	2	2.563.210.475		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	53	53		55		55		55		55		55			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				72.743.300		83.505.800		104.382.250		106.991.806		109.666.601		112.408.266		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	72.743.300	1	83.505.800	1	104.382.250	1	106.991.806	1	109.666.601	1	112.408.266		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.860.365		186.178.950		303.641.431		311.232.466		319.013.277		326.988.608		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	250.860.365	4	186.178.950	4	303.641.431	4	311.232.466	4	319.013.277	4	326.988.608		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				175.260.250		134.941.250		172.676.563		176.993.477		181.418.313		185.953.770		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	175.260.250	3	134.941.250	3	172.676.563	3	176.993.477	3	181.418.313	3	185.953.770		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				441.684.100		535.217.850		732.703.000		751.020.575		769.796.089		789.040.991		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	441.684.100	2	535.217.850	2	732.703.000	2	751.020.575	2	769.796.089	2	789.040.991		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				51.460.000		51.460.000		64.325.000		65.933.125		67.581.453		69.270.989		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	51.460.000	2	51.460.000	2	64.325.000	2	65.933.125	2	67.581.453	2	69.270.989		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				334.040.000		655.949.000		1.002.467.500		1.027.529.187		1.053.217.416		1.079.547.851		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	53	53	334.040.000	55	655.949.000	55	1.002.467.500	55	1.027.529.187	55	1.053.217.416	55	1.079.547.851		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.189.623.000		0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	95	83	1.189.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.189.623.000		0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	95	83	1.189.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.322.168.225		2.354.101.625		2.944.893.281		3.018.515.613		3.093.978.502		3.171.327.963		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	32	32	2.322.168.225	32	2.354.101.625	32	2.944.893.281	32	3.018.515.613	32	3.093.978.502	32	3.171.327.963		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	25	25		25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	38	38		38		38		38		38		38			
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.100.000		10.100.000		12.625.000		12.940.625		13.264.140		13.595.743		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	32	32	10.100.000	32	10.100.000	32	12.625.000	32	12.940.625	32	13.264.140	32	13.595.743		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				485.772.000		485.772.000		607.215.000		622.395.375		637.955.259		653.904.140		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	25	25	485.772.000	25	485.772.000	25	607.215.000	25	622.395.375	25	637.955.259	25	653.904.140		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.826.296.225		1.858.229.625		2.325.053.281		2.383.179.613		2.442.759.103		2.503.828.080		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	38	38	1.826.296.225	38	1.858.229.625	38	2.325.053.281	38	2.383.179.613	38	2.442.759.103	38	2.503.828.080		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.626.852.000		2.233.162.000		2.694.952.500		2.762.326.312		2.831.384.468		2.902.169.079		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.626.852.000	1	2.233.162.000	1	2.694.952.500	1	2.762.326.312	1	2.831.384.468	1	2.902.169.079		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26		26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	51		172		172		172		172		172			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				339.550.000		36.940.000		46.175.000		47.329.375		48.512.609		49.725.424		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	339.550.000	1	36.940.000	1	46.175.000	1	47.329.375	1	48.512.609	1	49.725.424		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				573.746.000		892.916.000		1.116.145.000		1.144.048.625		1.172.649.840		1.201.966.086		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	573.746.000	26	892.916.000	26	1.116.145.000	26	1.144.048.625	26	1.172.649.840	26	1.201.966.086		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.500.000		251.700.000		299.375.000		306.859.375		314.530.859		322.394.130		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	51	239.500.000	172	251.700.000	172	299.375.000	172	306.859.375	172	314.530.859	172	322.394.130		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.474.056.000		1.051.606.000		1.233.257.500		1.264.088.937		1.295.691.160		1.328.083.439		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.474.056.000	1	1.051.606.000	1	1.233.257.500	1	1.264.088.937	1	1.295.691.160	1	1.328.083.439		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				24.554.387.400		24.476.823.800		21.863.108.105		22.424.672.994		23.073.248.855		24.040.120.888		
Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	40	40	24.554.387.400	40	24.476.823.800	40	21.863.108.105	40	22.424.672.994	40	23.073.248.855	40	24.040.120.888		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	40	40		40		40		40		40		40			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				24.268.837.400		24.066.513.800		21.351.058.105		21.899.821.745		22.535.276.326		23.488.699.047		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	40	40	24.268.837.400	40	24.066.513.800	40	21.351.058.105	40	21.899.821.745	40	22.535.276.326	40	23.488.699.047		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				222.240.000		287.020.000		357.912.500		366.860.312		376.031.819		385.432.614		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1	1	222.240.000	1	287.020.000	1	357.912.500	1	366.860.312	1	376.031.819	1	385.432.614		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				63.310.000		123.290.000		154.137.500		157.990.937		161.940.710		165.989.227		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	40	40	63.310.000	40	123.290.000	40	154.137.500	40	157.990.937	40	161.940.710	40	165.989.227		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				1.369.248.000		1.412.190.000		1.759.160.000		1.803.138.999		1.848.217.473		1.894.422.908		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	1.369.248.000	7	1.412.190.000	7	1.759.160.000	7	1.803.138.999	7	1.848.217.473	7	1.894.422.908		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	120	119		308		308		308		308		308			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	40	40		40		40		40		40		40			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				521.776.000		676.348.000		812.870.000		833.191.750		854.021.543		875.372.081		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	120	119	521.776.000	308	676.348.000	308	812.870.000	308	833.191.750	308	854.021.543	308	875.372.081		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				594.022.000		502.022.000		627.527.500		643.215.687		659.296.079		675.778.480		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	40	40	594.022.000	40	502.022.000	40	627.527.500	40	643.215.687	40	659.296.079	40	675.778.480		
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				253.450.000		233.820.000		318.762.500		326.731.562		334.899.851		343.272.347		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	253.450.000	7	233.820.000	7	318.762.500	7	326.731.562	7	334.899.851	7	343.272.347		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				32.214.609.250		49.520.734.750		50.527.953.677		51.810.447.150		53.218.947.569		55.051.563.302		
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi (Persentase)	100	100	32.214.609.250	100	3.167.995.000	100	3.330.000.000	100	3.480.250.000	100	3.630.500.000	100	3.780.575.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.120.870.000		3.167.995.000		3.330.000.000		3.480.250.000		3.630.500.000		3.780.575.000		
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	1.120.870.000	1	3.167.995.000	1	3.330.000.000	1	3.480.250.000	1	3.630.500.000	1	3.780.575.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				43.150.000		634.075.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				287.800.000		405.625.000		425.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	2	287.800.000	2	405.625.000	2	425.000.000	2	450.000.000	2	475.000.000	2	500.000.000		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				349.880.000		756.755.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	349.880.000	1	756.755.000	1	800.000.000	1	825.000.000	1	850.000.000	1	875.000.000		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				111.600.000		655.795.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000		775.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	111.600.000	1	655.795.000	1	700.000.000	1	725.000.000	1	750.000.000	1	775.000.000		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				4.375.000		4.950.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.575.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1	4.375.000	1	4.950.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.500.000	1	5.575.000		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				324.065.000		710.795.000		750.000.000		775.000.000		800.000.000		825.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	324.065.000	1	710.795.000	1	750.000.000	1	775.000.000	1	800.000.000	1	825.000.000		
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu (Persentase)	100	77,78	7.304.055.000	81,82	11.327.809.000	84,62	10.823.543.677	86,67	11.231.577.150	88,24	12.048.827.569	94,44	13.275.368.302		
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				7.304.055.000		11.327.809.000		10.823.543.677		11.231.577.150		12.048.827.569		13.275.368.302		
Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	7	9	7.304.055.000	11	11.327.809.000	13	10.823.543.677	15	11.231.577.150	17	12.048.827.569	18	13.275.368.302		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	10	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		0		0		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	0		40		0		0		0		0			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1.668.260.000		1.812.660.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	1.668.260.000	1	1.812.660.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000	1	2.000.000.000		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3.330.080.000		7.160.730.000		7.488.543.677		7.700.000.000		7.900.000.000		8.750.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	7	9	3.330.080.000	11	7.160.730.000	13	7.488.543.677	15	7.700.000.000	17	7.900.000.000	18	8.750.000.000		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				960.100.000		959.200.000		965.000.000		1.031.577.150		933.827.569		1.205.368.302		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	10	10	960.100.000	10	959.200.000	10	965.000.000	10	1.031.577.150	10	933.827.569	10	1.205.368.302		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				1.326.740.000		510.000.000		520.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	5	5	1.326.740.000	5	510.000.000	5	520.000.000	5	600.000.000	5	625.000.000	5	650.000.000		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				18.875.000		536.675.000		0		0		640.000.000		670.000.000		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	18.875.000	1	536.675.000	0	0	0	0	1	640.000.000	1	670.000.000		
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				0		348.544.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	0	0	40	348.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi (Persentase)	100	98,08	4.566.897.000	98,08	10.510.259.000	98,08	11.549.995.000	98,08	12.125.000.000	98,08	12.400.000.000	98,08	12.700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4.566.897.000		10.510.259.000		11.549.995.000		12.125.000.000		12.400.000.000		12.700.000.000		
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	4.566.897.000	1	10.510.259.000	1	11.549.995.000	1	12.125.000.000	1	12.400.000.000	1	12.700.000.000		
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				672.595.500		1.347.893.500		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12	672.595.500	12	1.347.893.500	12	1.400.000.000	12	1.450.000.000	12	1.500.000.000	12	1.550.000.000		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				743.609.500		1.460.753.500		1.500.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12	743.609.500	12	1.460.753.500	12	1.500.000.000	12	1.550.000.000	12	1.600.000.000	12	1.650.000.000		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				667.195.000		1.347.893.500		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12	667.195.000	12	1.347.893.500	12	1.400.000.000	12	1.450.000.000	12	1.500.000.000	12	1.550.000.000		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				686.191.500		1.353.293.500		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12	686.191.500	12	1.353.293.500	12	1.400.000.000	12	1.450.000.000	12	1.500.000.000	12	1.550.000.000		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				3.825.000		540.600.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	3.825.000	1	540.600.000	1	600.000.000	1	625.000.000	1	650.000.000	1	675.000.000		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				1.374.500.000		3.912.050.000		4.649.995.000		4.975.000.000		5.000.000.000		5.050.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2	2	1.374.500.000	2	3.912.050.000	2	4.649.995.000	2	4.975.000.000	2	5.000.000.000	2	5.050.000.000		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				418.980.000		547.775.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	418.980.000	1	547.775.000	1	600.000.000	1	625.000.000	1	650.000.000	1	675.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD (Persentase)	85,42	97,92	19.222.787.250	98	24.514.671.750	98	24.824.415.000	98	24.973.620.000	97,96	25.139.620.000	98	25.295.620.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				10.923.913.000		9.979.934.000		10.226.415.000		10.297.120.000		10.357.120.000		10.417.120.000		
Meningkatnya keselarasan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2	2	10.923.913.000	2	539.125.000	2	540.000.000	2	545.000.000	2	550.000.000	2	555.000.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				11.825.000		539.125.000		540.000.000		545.000.000		550.000.000		555.000.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2	2	11.825.000	2	539.125.000	2	540.000.000	2	545.000.000	2	550.000.000	2	555.000.000		
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1	1	6.814.448.000	1	4.743.689.000	1	4.989.295.000	1	5.055.000.000	1	5.110.000.000	1	5.165.000.000		
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	18	19		20		20		20		20		20			
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				924.444.000		932.052.000		950.000.000		955.000.000		960.000.000		965.000.000		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1	1	924.444.000	1	932.052.000	1	950.000.000	1	955.000.000	1	960.000.000	1	965.000.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				5.890.004.000		3.811.637.000		4.039.295.000		4.100.000.000		4.150.000.000		4.200.000.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	18	19	5.890.004.000	20	3.811.637.000	20	4.039.295.000	20	4.100.000.000	20	4.150.000.000	20	4.200.000.000		
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	3	3	4.097.640.000	3	4.697.120.000	3	4.697.120.000	3	4.697.120.000	3	4.697.120.000	3	4.697.120.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	5	6		6		6		6		6		6			
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7		7		7		7		7		7			
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				3.281.640.000		3.648.320.000		3.648.320.000		3.648.320.000		3.648.320.000		3.648.320.000		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	5	6	3.281.640.000	6	3.648.320.000	6	3.648.320.000	6	3.648.320.000	6	3.648.320.000	6	3.648.320.000		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				480.000.000		712.800.000		712.800.000		712.800.000		712.800.000		712.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	3	3	480.000.000	3	712.800.000	3	712.800.000	3	712.800.000	3	712.800.000	3	712.800.000		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				336.000.000		336.000.000		336.000.000		336.000.000		336.000.000		336.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7	336.000.000	7	336.000.000	7	336.000.000	7	336.000.000	7	336.000.000	7	336.000.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.316.713.250		4.954.049.750		4.958.000.000		4.965.000.000		4.995.000.000		5.025.000.000		
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	4.316.713.250	3	4.954.049.750	3	4.958.000.000	3	4.965.000.000	2	4.995.000.000	3	5.025.000.000		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				669.357.000		1.187.186.000		1.188.000.000		1.190.000.000		1.195.000.000		1.200.000.000		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	3	669.357.000	3	1.187.186.000	3	1.188.000.000	3	1.190.000.000	3	1.195.000.000	3	1.200.000.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				3.647.356.250		3.766.863.750		3.770.000.000		3.775.000.000		3.800.000.000		3.825.000.000		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	3.647.356.250	3	3.766.863.750	3	3.770.000.000	3	3.775.000.000	2	3.800.000.000	3	3.825.000.000		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				422.600.000		1.317.700.000		1.345.000.000		1.375.000.000		1.410.000.000		1.445.000.000		
Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	1	422.600.000	1	1.317.700.000	1	1.345.000.000	1	1.375.000.000	1	1.410.000.000	1	1.445.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				310.300.000		891.000.000		895.000.000		900.000.000		910.000.000		920.000.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	1	310.300.000	1	891.000.000	1	895.000.000	1	900.000.000	1	910.000.000	1	920.000.000		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				112.300.000		426.700.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000		525.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12	112.300.000	12	426.700.000	12	450.000.000	12	475.000.000	12	500.000.000	12	525.000.000		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				573.020.000		1.271.150.000		1.275.000.000		1.285.000.000		1.295.000.000		1.300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1	3	573.020.000	3	1.271.150.000	3	1.275.000.000	3	1.285.000.000	3	1.295.000.000	3	1.300.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1	1		0		0		0		0		0			
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				473.720.000		1.271.150.000		1.275.000.000		1.285.000.000		1.295.000.000		1.300.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1	3	473.720.000	3	1.271.150.000	3	1.275.000.000	3	1.285.000.000	3	1.295.000.000	3	1.300.000.000		
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				99.300.000		0		0		0		0		0		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1	1	99.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				2.986.541.000		6.991.838.000		7.020.000.000		7.051.500.000		7.082.500.000		7.108.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1	2	2.986.541.000	2	6.991.838.000	2	7.020.000.000	2	7.051.500.000	2	7.082.500.000	2	7.108.500.000		
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	12		12		12		12		12		12			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				516.925.000		1.134.170.000		1.140.000.000		1.150.000.000		1.160.000.000		1.170.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1	2	516.925.000	2	1.134.170.000	2	1.140.000.000	2	1.150.000.000	2	1.160.000.000	2	1.170.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				10.380.000		15.730.000		20.000.000		21.500.000		22.500.000		23.500.000		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1	10.380.000	1	15.730.000	1	20.000.000	1	21.500.000	1	22.500.000	1	23.500.000		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				940.100.000		2.900.030.000		2.915.000.000		2.930.000.000		2.945.000.000		2.955.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	12	940.100.000	12	2.900.030.000	12	2.915.000.000	12	2.930.000.000	12	2.945.000.000	12	2.955.000.000		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1.519.136.000		2.941.908.000		2.945.000.000		2.950.000.000		2.955.000.000		2.960.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	4	1.519.136.000	4	2.941.908.000	4	2.945.000.000	4	2.950.000.000	4	2.955.000.000	4	2.960.000.000		

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja oraganisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan darah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas antara lain :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD					
1.	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
				4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

				4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
				4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
				4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025 – 2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai pedoman

dalam pencapaian kinerja pemerintah. IKU Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD									
2.	Indeks kepuasan fasilitasi DPRD	Nilai	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	
3.	Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase	88,33	92,54	93,76	94,60	95,22	95,68	97,55	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025 – 2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tidak menentukan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta periode 2025 -2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstr aini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Renstra ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen Bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam Upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pohon Kinerja Sekretariat DPRD

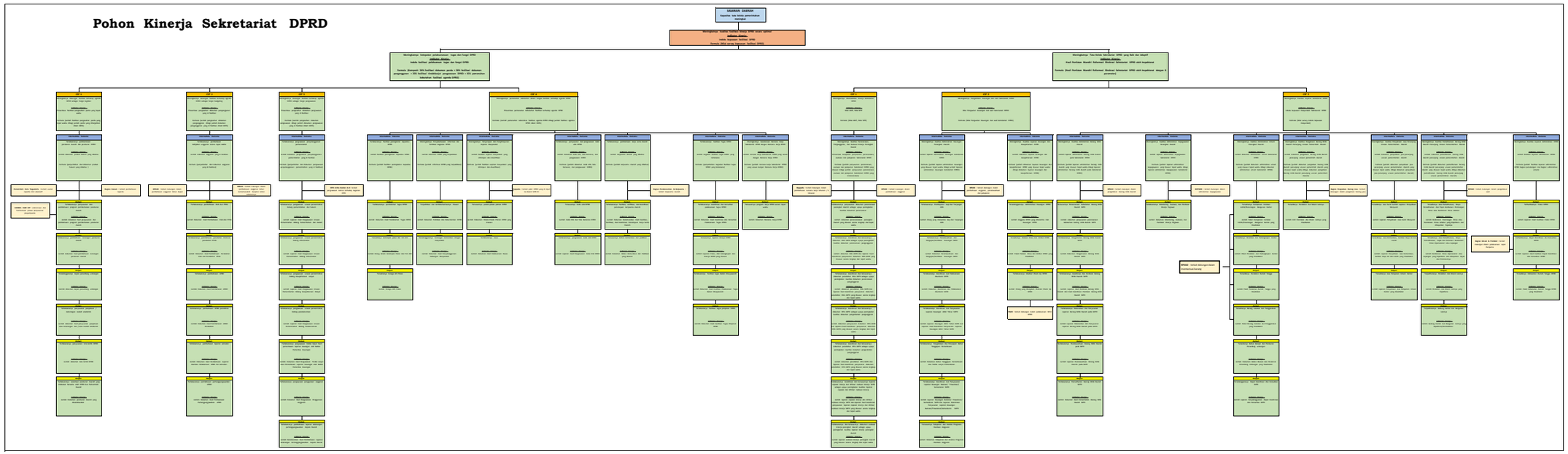

CASCADING SEKRETARIAT DPRD

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target						Usulan Perubahan Nomenklatur
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan tERmate Outcome pada Pohon Kinerja OPD yang Anda tarSeda dgn sasaran jika bisa	Tulis Indikator Kinerja Output dan tERmate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Sasaran Strategis tERmate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis tERmate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 900	Tulis Sasaran Program Intermediate Outcome/OSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program Intermediate Outcome/OSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 900	Tulis Sasaran Kegiatan Inilai Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Inilai Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang Yang mengampu Indikator kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Subkegiatan yang diambil dari Kepmen 900	Tulis Kinerja Keluaran/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Seksi/Kasi Yang mengampu Indikator subkegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA	Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal	Indeks kepuasan fasilitasi DPRD	Nilai survey kepuasan fasilitasi DPRD	86,5	87	87,5	88	88,5	89	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Komponen * 30% fasilitasi dokumen perda + 30% fasilitasi dokumen penganggaran + 20% fasilitasi tindaklanjut pengawasan DPRD + 10% pemenuhan kebutuhan fasilitasi agenda DPRD	92,94%	93,76%	94,60%	95,22%	96,86%	97,38%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi	Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu	Jumlah fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu dibagi jumlah perda yang ditargetkan dikali 100%	77,78%	91,83%	94,83%	96,97%	98,24%	94,44%	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pertauran DPRD	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas	Penjumlahan dari dokumen produk hukum yang dibahas	Kepala Bagian Pembinaan dan Perundang Undangan	26 Dokumen	26 Dokumen	29 Dokumen	31 Dokumen	34 Dokumen	36 Dokumen	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen	17 Dokumen	19 Dokumen	
																															Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Terselenggaranya kajian perundang undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	
																															Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
																															Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen peraturan daerah yang disosialisasikan	Kepala Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan		43 Orang					
																			Menciptakan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting	Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang tepat waktu	Jumlah pengesahan dokumen penganggaran dibagi jumlah dokumen penganggaran yang di fasilitasi dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran secara tepat waktu	Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi	Penjumlahan dari dokumen anggaran yang di fasilitasi	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																			Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan	Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi	Jumlah pengesahan dokumen pengawasan dibagi jumlah dokumen pengawasan yang di fasilitasi dikali 100%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi	Penjumlahan dari dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan hukum	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																															Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																															Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																															Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																															Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terselenggaranya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD	Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitasi agenda DPRD dibagi jumlah fasilitasi agenda DPRD dikali 100%	97,92%	98,09%	98,09%	98,09%	97,94%	98,09%	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kepala Bagian Administrasi Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Pendataan Tugas	Terlaksananya pendataan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendataan tugas DPRD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
																															Pengelolaan Keuangan Pakar dan Tim Ahli	Terselenggara secorpsk pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam pengelolaan pakar dan tim ahli	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	
																															Pengelolaan Tenaga Ahli Fraksi	Terselenggara tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	
																															Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya keselarasan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja DPRD	Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD	Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD	Kepala Bagian Pendampingan dan Perundang Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terselenggaranya program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Kepala Tim Kerja Perencanaan dan Realisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi	Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi	Kepala Bagian Pendampingan dan Perundang Undangan	20 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan kemitraan dengan masyarakat	Jumlah dokumen penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kepala Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pusblikasi dan Dokumentasi DPRD	Tersedianya dan terdokumentasinya Dewan	Jumlah dan jenis publikasi dan dokumentasi DPRD	Kepala Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi	10 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	
																			Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditimpun dan disertifikasi	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditimpun dan disertifikasi	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Meningkatnya publik-publik yang	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Kepala Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Kepala Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
																															Pembinaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD	Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya susun kode etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Kepala Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																															Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dibahas	Jumlah kerjasama daerah yang dibahas	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perencanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi, dan koordinasi perencanaan kerja sama daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi perencanaan kerja sama daerah	Kepala Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Penyusunan Bahan Komunikasi dan publikasi	Terlaksananya bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi	Kepala Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kepala Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
																			Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	Penjumlahan kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya laporan kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja, dan keterangan dan data DPRD yang disusun	Kepala Tim Kerja Perencanaan dan Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
																															Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kepala Tim Kerja Perencanaan dan Realisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
																															Fasilitasi Tugas Rimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kepala Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
A											Meningkatnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dan Inspektorat	Hasil penilaian RB Sekretariat DPRD oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat DPRD 3. Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian penerapan Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Sekretariat DPRD 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	A (80-100)	A (80-90)	A (80,2-90)	A (80,4-90)	A (80,6-90)	A (80,8-90)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (81,3-84,5)	A (84-87)	A (84,2-87,3)	A (84-90)	A (85,3-88,5)	A (84-90)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD yang telah ditelaah oleh Inspektorat dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD 2. Jumlah ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat DPRD	1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD yang telah ditelaah 2. Jumlah ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Administrasi Umum	9 Dokumen 100%	9 Dokumen 100%	9 Dokumen 100%	9 Dokumen 100%	9 Dokumen 100%	9 Dokumen 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	RekanTim Kerja PIDP	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	
																				Nilai SPIP Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Terkelola & Teruitur (4,407 -4,58)	Terkelola & Teruitur (4,408 -4,58)	Terkelola & Teruitur (4,409 -4,58)	Terkelola & Teruitur (4,410 -4,58)	Terkelola & Teruitur (4,411 -4,58)	Terkelola & Teruitur (4,412 -4,58)												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Terkoordinasinya dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -SKPD	RekanTim Kerja PIDP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																				Nilai IKM Sekretariat DPRD	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	83,67	84,67	86,67	89,67												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasinya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	RekanTim Kerja PIDP	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasinya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	RekanTim Kerja PIDP	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terkoordinasinya dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	RekanTim Kerja PIDP	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

| | | |

| | | |

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(0274) 515207/554432
bappeda@jogjakota.go.id
bappeda.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala

Agus Tri Haryono, ST.,MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Yogyakarta 6
2.2. Sumber Daya Bappeda Kota Yogyakarta 12
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta 32
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 42
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 42
2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah 42
2.7. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah 43
2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 48
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 48
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54
4.1. Uraian Program 54
4.2. Uraian Kegiatan 55
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 58
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 157
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda 159
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 159

BAB V PENUTUP 160
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Juli 2025 12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan 30
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon 30
Tabel 2.4 Daftar Inventaris Bappeda 31
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2020-2024 33
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Program Bappeda Tahun 2020-2024 34
Tabel 2.7 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah 45
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 49
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta 51
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 52
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 59
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta 71
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 96
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra 157
Tabel 4.5 Indikator kinerja utama rancangan akhir renstra PD 159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD 2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Bappeda 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah , pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi acuan dalam mengamati pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Yogyakarta adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yogyakarta 2025-2029 dari aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta adalah :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029.
c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 (lima) tahun.
e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

f. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan , dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dan menyajikan kelompok sasaran layanan Bappeda.

Disamping itu pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023, Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan. Tugas Badan adalah membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi. Adapun susunan organisasi Bappeda terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah.
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bappeda;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Kesekretariatan Badan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Badan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan badan;
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas badan.

Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan Daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
i. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
j. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian;
l. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian;
m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian;
n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Bidang Riset, Inovasi Daeah dan Pengendalian; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya yang sah;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan analisa data pembangunan Daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian.

Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perekonomian;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perekonomian;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perekonomian;
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perekonomian;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perekonomian;
j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perekonomian;

k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perekonomian; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Adapun struktur atau susunan organisasi Bappeda dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini :

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Bappeda

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Yogyakarta

a. Sumber Daya Pegawai

Bappeda didukung oleh 54 orang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ketrampilan memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) sampai bulan Juli Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Juli Tahun 2025

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
1		**Kepala Badan**	S1 semua jurusan diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika	1	S2	1	1	-

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			Pembangunan /S2 yang serumpun					
2		**Sekretaris**	S1 Planologi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Teknik Sipil, S1 Hukum, S1 Geografi diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan /S2 yang serumpun	1	S2	1	-	1
3		**Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian**	S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Pemerintahan, S1 Administrasi diutamakan S2 Manajemen/Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun	1	S1	1	-	1
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4	1	S1	1	1	-

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			(Diploma-Empat)					
	b)	Pengadministrasi Perkantoran	D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat	2				
	c)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	2				
	d)	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat / DI (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) / S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	SLTA sederajat	1	1	
4		**Rumpun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	S1	1	1	
	b)	Pengadministrasi Perkantoran	D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat	1				

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
5		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Perencana Ahli Muda*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	1	S1	1		1
6		**Kepala Sub Bag Keuangan**	S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Akuntansi, S1 Manajemen diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/ S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan /S2 Administrasi Publik/ S2 yang serumpun	1	-	-	-	

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	SLTA sederajat	1	1	
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	4	D3	2		2
7		**Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian**	S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Pertanian, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kependidikan, S1 Ilmu Budaya, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Planologi, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi, S1 Statistika diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 yang serumpun	1	S3	1	1	
8		**Rumpun Riset**						

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	1				
9		**Rumpun Inovasi Daerah**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2				
10		**Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1	1	
11		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Analis Kebijakan Ahli Muda*	Sarjana (S1) atau Diploma IV	2	S1	1	1	

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	b)	*Perencana Ahli Pertama*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	2	S1	1		1
	c)	*Perencana Ahli Muda*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	1	S2	1		1
	d)	*Peneliti Ahli Pertama*	S2 sesuai bidang ilmu	2	S2	2	1	1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			yang dibutuhkan					
12		**Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	S1 Planologi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Teknik Sipil, S1 Geografi, S1 Hukum diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 yang serumpun	1	S1	1		1
13		**Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
14		**Rumpun Perencanaan Pendanaan keistimewaan dan Non APBD**						

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S2	1		1
15		**Rumpun Analisa Data Pembangunan**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1
16		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Perencana Ahli Pertama*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S1	2	1	1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	b)	*Perencana Ahli Muda*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S1/S2	3	1	2
17		**Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	S1 Sosiologi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Geografi diutamakan S2 Manajemen/S2 Sosiologi/S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/ S2 yang serumpun	1	S2	1	1	
18		**Rumpun Kesejahteraan Rakyat**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4	3	S1	1		1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			(Diploma-Empat)					
19		**Rumpun Pemerintahan**						
	a)	Fasilitator Pemerintahan	Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan /Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/Hukum /Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	S1	1	1	
	b)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1
20		**Rumpun Pembangunan Manusia**						

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1
21		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Perencana Ahli Pertama*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	2	S1	2	1	1
	b)	*Perencana Ahli Muda*	Sarjana (S1) atau Diploma IV Rumpun Ilmu Humaniora, Rumpun Ilmu Sosial, Rumpun Ilmu Alam, Rumpun Ilmu Formal, Rumpun Ilmu Terapan, atau	5	S1	3	2	1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			Rumpun lainnya, sesuai dengan kebutuhan di bidang perencanaan pembangunan					
22		**Kepala Bidang Perekonomian**	S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Statistika, S1 Geografi diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan /S2 yang serumpun	1	S2	1		1
23		**Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2				
24		**Rumpun Pengembangan Dunia Usaha**						

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
25		**Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
26		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Perencana Ahli Pertama*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	5	S1	4	1	3

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	b)	*Perencana Ahli Muda*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S2	3	1	2
	c)	*Analis Perdagangan Ahli Pertama*	Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) di bidang Ekonomi, Hukum, Sosial dan Politik, Komunikasi, Administrasi Negara, Pertanian, Maritim, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Statistika, atau Desain Produk	1	S1	1		1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
27		**Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Planologi, S1 Teknik Lingkungan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Pertanian, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kependidikan, S1 Ilmu Budaya, diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan /S2 yang serumpun	1	S2	1		1
28		**Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
29		**Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	D4	2		2
30		**Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah**						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	S1	1	1	
31		**Kelompok Jabatan Fungsional**						
	a)	*Perencana Ahli Pertama*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu	2	S1	2	1	1

No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan					
	b)	*Perencana Ahli Muda*	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	4	S2	3		3
		JUMLAH		**89**		**54**	**20**	**34**

Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 89 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 54 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 35 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SLTA sebanyak 2 pegawai, D3 sebanyak 3 pegawai, D-IV sebanyak 3 pegawai, S1 sebanyak 30 pegawai, S2 sebanyak 16 pegawai, dan pendidikan tertinggi adalah S3 sebanyak 1 pegawai. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia kurang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 20 orang atau 37,04% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 34 orang atau 62,96% dari jumlah total pegawai.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	43
3	II	4
4	I	-

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	6
4	IV	1
5	Jabatan Fungsional	32
6	Jabatan Pelaksana	14

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda yang ideal didukung oleh 89 orang pegawai dengan rincian Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebanyak 9 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 37 orang, dan Jabatan Pelaksana sebanyak 43 orang. Dengan demikian sampai dengan Bulan Juli tahun 2025 Bappeda Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP) untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas - tugas Bappeda.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda dirasa belum memadai dengan adanya pegawai sejumlah 54 orang dan 15 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP). Di samping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Bappeda juga belum memadai, mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai

dengan tata kala perencanaan selalu bersamaan. Data sarana dan prasarana Bappeda Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Bappeda

No	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda 4	4
2	Kendaraan roda 2	22
3	Kendaraan roda 2 listrik	1
4	Alat Ukur	1
5	Alat Kantor	67
6	Alat Rumah Tangga	467
7	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25
8	Alat Studio	24
9	Alat Komunikasi	1
10	Alat Laboratorium	2
11	Komputer Unit	47
12	Peralatan Komputer	50
13	Alat Kerja Penerbangan	1
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7
15	Bahan Perpustakaan Tercetak	36
16	Alat Bercorak Kebudayaan	9
17	Tanda Penghargaan	2
18	Aset Tidak Berwujud	126
19	Aset Lain-lain	14

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua)

sebanyak 22 unit, roda 4 (empat) sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua listrik 1 (satu) unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 54 orang pegawai dan 15 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP), akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2017-2021 dan Renstra Tahun 2022-2026. Tetapi untuk capaian kinerja pelayanan Bappeda akan diambil pencapaian lima tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024. Meskipun Renstra berakhir pada tahun 2026 tetapi mulai tahun 2025 akan disusun Renstra baru periode 2025-2029 senyampang dengan ditetapkannya RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, yaitu mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Pencapaian target sasaran Bappeda sesuai dengan Renstra yang akan diperbandingkan adalah mulai tahun 2020-2024. Dari target yang ditetapkan, capaian kinerja Bappeda realisasinya berhasil atau tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Adapun formula penghitungannya adalah 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah. Tetapi mulai tahun 2023 dilaksanakan reviu untuk formula perhitungannya yaitu 20% capaian sasaran pemkot + 40% sasaran perangkat daerah + 40% capaian program perangkat daerah.

Sasaran Bappeda yang semula hanya satu yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 semua sasaran strategis Perangkat Daerah ditambah dengan meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2024 untuk hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi formula untuk perhitungannya juga direviu dengan sumber data 8 parameter yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun capaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persen	92.00	98.73	107.30	92.20	98.60	106.90	92.40	95.33	103.17	92.50	98.18	106.14	92.60	99.67	107.63
Meningkatnya Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	AA	109.53	A	AA	102.4

Dari tabel 2.5 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja utama Bappeda dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, meskipun realisasinya dari tahun ke tahun ada yang turun kemudian naik lagi. Hal ini disebabkan karena capaian indikator sasaran daerah, indikator sasaran perangkat daerah dan indikator program perangkat daerah mitra Bappeda ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai sehingga mempengaruhi kinerja utama Bappeda.

Dalam pencapaian sasaran Bappeda dilakukan melalui implementasi beberapa program yang diukur melalui indikator masing-masing program. Adapun target dan capaian kinerja pelayanan sasaran program Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Program Bappeda Tahun 2020-2024

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia		92,00%	98,00%	92,20%	98,27%	92,40%	98,85%	92,50%	99,25%	92,60%	99,47%
		Data:											
		Capaian target sasaran Pemkot sektor PPM	%		100,00%		99,73%		100%		-		-
		Capaian sasaran Perangkat daerah sektor PPM	%		95,17%		95,55%		97,39%		99,23%		99,35%
		Capaian program sektor PPM	%		97,75%		99,52%		99,16%		99,27%		99,59%
	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program		92,00%	98,00%	92,20%	98,57%	92,40%	95,65%	92,50%	99,61%	92,60%	99,53%

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
	dan kewilayahan	sektor infrastruktur dan kewilayahan											
		Data:											
		Capaian target sasaran Pemkot sektor fisik	%		100,00%		100%		96,73%		-		-
		Capaian sasaran Perangkat daerah fisik	%		96,82%		95,13%		92,41%		99,79%		99,25%
		Capaian program sektor fisik	%		97,19%		97,73%		97,80%		99,42%		99,80%
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor perekonomian		92,00%	97,64%	92,20%	99,06%	92,40%	98,75%	92,50%	99,45%	92,60%	99,88%
		Data:											
		Capaian target sasaran Pemkot sektor perekonomian	%		100,00%		99,15%		100%		-		-
		Capaian sasaran Perangkat daerah sektor perekonomian	%		95,48%		98,71%		99,21%		99,52%		99,99%
		Capaian program sektor perekonomian	%		98,51%		99,12%		97,04%		99,38%		99,77%

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah		92,00%	96,83%	92,20%	97,63%	92,40%	97,70%	-	-	-	-
		Data:											
		Capaian target sasaran perangkat daerah	%		95,69%		96,46%		97,52%		-		-
		Capaian program perangkat daerah	%		97,96%		98,79%		97,88%		-		-
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sasarn daerah	Rata-rata capaian sasaran daerah	%	-	-	-	-	-	-	92,50%	97,28%	92,60%	99,69%
		Data :											
		Capaian sasaran daerah			-		-		-		97,28%		99,69%
	Persentase ketepatan evaluasi	(Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat/jumlah keseluruhan dokumen	**%**	**-**	**-**	100%	100%	100%	100%	**-**	**-**	100%	100%

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
	dokumen perencanaan	evaluasi yang harus disusun) x 100%											
		Data :											
		Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat				4	4	4	4	-	-	4	4
		Jumlah dokumen evaluasi yang harus disusun				4	4	4	4	-	-	4	4
	Persentase kemanfaatan analisa dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah kemanfaatan Analisa dalam perencanaan pembangunan)/(Jumlah total Analisa dalam perencanaan pembangunan) x 100%	%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Data :											
		Jumlah kemanfaatan Analisa dalam perencanaan pembangunan		-	-	-	-	-	-	484	484	569	569

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
		Jumlah total Analisa dalam perencanaan pembangunan		-	-	-	-	-	-	484	484	569	569
Program penelitian dan pengembangan	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindaklanjuti/jumlah penelitian yang dilakukan)x100%		86%	100%	88%	100%	90%	90%	-	-	-	-
		Data:											
		Jumlah penelitian yang sudah ditindaklanjuti		86	100	88	100	90	90	-	-	-	-
	Persentase kemanfaatan penelitian dan pengembangan	(25% kajian Pemerinth Kota yang telah masuk jurnal atau DSS+30% kajian Bappeda yg telah terkomunikasikan kepada OPD+35% kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD+10% kajian terimplementasikan	%	-	-	-	-	-	-	91%	92,31%	92%	93,75%

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
		pada program OPD)x 100%											
		Data :											
		Kajian telah masuk jurnal /DSS		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
		Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
		Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
		Kajian terimplementasi pada program OPD		-	-	-	-	-	-	-	23,08	-	-
		Kajian Pemerintah Kota yang telah masuk jurnal /DSS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
		Kajian terimplementasi pada program OPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,50
	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	63,76	86,11	-	-
		Data :											
		Skor rata-rata inovasi perangkat daerah									86,11		
	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri Data :	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	75	88,84
		Penilaian Mandiri Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri									-	88,84	

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
		Data :											
		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	A		A

Dari tabel 2.6 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelayanan sasaran Bappeda dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasinya selalu tercapai bahkan melebihi target. Ada beberapa indikator program, formula indikator program dan sumber data yang mengalami perubahan atau reviu. Di samping itu juga mulai tahun 2023 ada tambahan program untuk program penunjang urusan kabuapaten/kota menjadi kinerja pelayanan sasaran Bappeda.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Layanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta pada kelompok sasaran adalah 51 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat, dan Kemantren.. Sasaran pelayanan untuk semua OPD berupa dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan inovasi serta penelitian dan pengembangan.

Disamping itu juga sasaran pelayanan Bappeda adalah melayani Perguruan Tingi yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Yogyakarta.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan ada beberapa perangkat daerah sesuai dengan crosscutting Bappeda dengan OPD(Organisasi Perangkat Daerah), yaitu :

a. Inspektorat :
   Dukungan pengawasan penyusunan dokumen perencanaan
b. BPKAD :
   Dukungan perencanaan anggaran dan perhitungan kemampuan keuangan daerah
c. Bagian Tata Pemerintahan :
   Dukungan perencanaan kegiatan mendukung SPM dan kinerja urusan
d. Bagian Organisasi :
   Dukungan kelembagaan dalam pencapaian kinerja
e. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian :
   Dukungan penyelenggaraan Forum Satu Data
f. Dinas Pertanian dan Tata Ruang :
   Dukungan penyelenggaraan Forum Satu Data
g. BKPSDM :
   Dukungan penguatan inovasi daerah
h. Semua OPD :
   Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan inovasi serta penelitian dan pengembangan.

2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tidak ada, namun demikian Bappeda selaku ketua Sekretariat Forum TSLP (Tanggung jawab

sosial dan lingkungan perusahaan) bekerja sama dengan BPD Cabang Senopati dan Bank Jogja untuk pelaksanaan kegiatan CSR.

2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah di Bappeda adalah kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat.

2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan

Bappeda Kota Yogyakarta merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan dalam peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

1. Belum optimalnya sinergi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Perangkat daerah belum memiliki pemahaman mendalam terkait perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah termasuk peran lintas sektornya, baik dalam hal perencanaan maupun pengendalian.
3. Hasil tahapan proses perencanaan belum terinformsikan ke stakeholder khususnya masyarakat secara transparan dan mudah diakses.
4. Belum optimalnya jejaring riset dengan Lembaga eksternal seperti BRIN, Bappenas, NGO, sektor swasta untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi daerah yang semakin luas dan kuat.
5. Belum optimalnya penumbuhan, pendampingan, dan pembinaan inovasi daerah.

b. Isu strategis perangkat daerah

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil dari rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sinergi perencanaan yang dapat mengakomodir isu global, nasional, propinsi, dan kota.
2. Tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi untuk optimalisasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Transparansi hasil perencaanaan Pembangunan.
4. Penumbuhan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Bappeda Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	Sinergi perencanaan yang dapat mengakomodir isu global, nasional, propinsi, dan kota.
	Perangkat daerah belum memiliki pemahaman mendalam terkait perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah termasuk peran lintas sektornya, baik dalam	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	Tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi untuk optimalisasi perencanaan pembangunan daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	hal perencanaan maupun pengendalian					
	Hasil tahapan proses perencanaan belum terinformsikan ke stakeholder khususnya masyarakat secara transparan dan mudah diakses.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	Transparansi hasil perencaanaan pembangunan
	Belum optimalnya jejaring riset dengan Lembaga eksternal seperti BRIN, Bappenas, NGO, sektor swasta untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi daerah	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	Penumbuhan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	yang semakin luas dan kuat					
	Belum optimalnya penumbuhan, pendampingan, dan pembinaan inovasi daerah.	Bappeda secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati.	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	Penumbuhan, pendampingan dan pembinaan inovasi daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Bappeda dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana berikut:

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	*(03)*	*(04)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Persentase)	85.41	88.61	91.98	95.48	96.34	96.55
	Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda (Nilai)	AA (92,14 – 95,14)	AA (92,16 - 95,16)	AA (92,18 - 95,18)	AA (92,20 - 95,20)	AA (92,22 - 95,22)	AA (92,24 - 95,24)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah	100	80	80	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	85.41	88.61	91.98	95.48	96.34	96.55	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda (Nilai)	AA (92,12)	AA (92,14 - 95,14)	AA (92,16 - 95,16)	AA (92,18 - 95,18)	AA (92,20 - 95,20)	AA (92,22 - 95,22)	AA (92,24 - 95,24)	

Komposit 30% kualitas perencanaan kinerja pemerintah kota yogyakarta + 30% ketercapaian sasaran daerah + 20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% + 20% ketercapaian program perangkat daerah

Kondisi awal di tahun 2025 dari Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar 85,41%. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2029 adalah sebesar 96,34%. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan, sehingga indikator mencapai 96,34% di tahun terakhir Renstra.

Kemudian untuk sasaran perangkat daerah Bappeda Kota Yogyakarta yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif dengan indikator sasaran yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda. Kondisi awal dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah

AA (92,12), target akhir yang dicapai pada tahun 2029 adalah AA (92,22 – 95,22). Dengan demikian dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan target AA akan tercapai di setiap tahunnya sampai di tahun terakhir Renstra.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif”. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Meningkatnya Kemanfaatan Riset
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda
   Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Penahapan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas perencanaan daerah serta perangkat daerah berbasis pohon kinerja, cascading dan cross cutting	Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah dengan optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dan lintas sektor melalui klinik perencanaan serta membangun kolaborasi stakeholder Pembangunan	Penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Monitoring dan Evaluasi kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengedepankan penggunaan hasil riset dan inovasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatkan penggunaan hasil riset dan inovasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah	Penguatan kualitas riset dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas riset dan inovasi daerah	Monitoring dan Evaluasi kualitas riset dan inovasi daerah

Arah dan kebijakan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah	- Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Perundangan - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Partisipatif Masyarakat	
		Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam	Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perencanaan pembangunan		
		Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Lintas Sektor	
		Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah	
		Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah	- Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta - Meningkatnya Kualitas Penelitian Tematis melalui Jaringan Penelitian - Meningkatnya Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	
		Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan Tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Bappeda Kota Yogyakarta pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 URAIAN PROGRAM

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda didukung oleh program-program berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat *supporting* atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan yang diampu oleh sekretariat yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Program yang bertujuan untuk menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yang tersebar di 2 bidang yakni bidang perencanaan Pembangunan daerah terdapat 2 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang riset, inovasi daerah, dan pengendalian terdapat 1 kegiatan yaitu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Program yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencaanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yang tersebar di 3 bidang/sektoral yang ada di Bappeda, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

4. Program Penelitian dan Engelmann Daerah

   Program Penelitian dan Pengembangan Daerah bertujuan untuk menyediakan hasil kajian, penelitian, dan inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penelitian kebijakan, pengembangan inovasi daerah, kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian, serta diseminasi hasil penelitian sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih akurat, inovatif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang diampu oleh Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Bappeda Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Bappeda Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kota Yogyakarta antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi

dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

    Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

15. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.

16. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

    Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

17. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

    Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, dan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

18. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

    Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01 - PERENCANAAN						12.035.468.502,00		12.280.260.997,00		12.591.943.184,00		12.934.273.567,00		13.379.663.297,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.132.587.120,00		10.338.675.008,00		10.601.079.739,00		10.889.278.547,00		11.264.238.649,00	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas	Nilai SAKIP Bappeda (Nilai)	Nilai	A (89,23)	A (89,24-90,00)	A (89,25-90,00)	10.132.587.120,00	A (89,26-90,00)	10.338.675.008,00	A (89,27-90,00)	10.601.079.739,00	A (89,28-90,00)	10.889.278.547,00	A (89,30-90,00)	11.264.238.649,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pelayanan Bappeda															
	Nilai SPIP Bappeda (Nilai)	Nilai	Optimum (4,65)	Optimum (4,66-5)	Optimum (4,67-5)		Optimum (4,69-5)		Optimum (4,7-5)		Optimum (4,71-5)		Optimum (4,72-5)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai IKM Bappeda (Nilai)	Nilai	89.04	89.14	89.24		89.34		89.44		89.54		89.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						478.724.574,00		488.461.831,00		500.858.995,00		514.477.350,00		532.195.950,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Persen	92.87	92.87	92.87	284.915.674,00	92.90	290.710.858,00	92.90	298.089.102,00	92.93	306.194.143,00	92.93	316.739.471,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)														
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pembangunan	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah (Persentase)	Persen	-	69.23	76.92	193.808.900,00	84.62	197.750.973,00	92.31	202.769.893,00	100	208.283.207,00	100	215.456.479,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI						1.424.156.808,00		1.453.124.158,00		1.490.004.450,00		1.530.517.670,00		1.583.228.698,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	99.35	84	85	405.247.608,00	88	413.490.345,00	88	423.984.730,00	90	435.512.874,00	90	450.511.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dengan Ketercapaian Lebih dari 90% (Persentase)														
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan	Persen	99.59	81.82	82.64		85.95		86.78		90.08		90.08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pembangunan Manusia (Persentase)														
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan	Persen	99.99	80	84	248.711.200,00	87	253.769.986,00	92	260.210.668,00	95	267.285.796,00	96	276.491.119,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Ketercapaian Lebih dari 90% (Persentase)														
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Persen	99.77	89.77	90.91		92.05		93.18		94.32		95.45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Persentase)														
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	Persen	99.25	93.33	95.00	770.198.000,00	96.67	785.863.827,00	98.33	805.809.052,00	100	827.719.000,00	100	856.225.641,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% (Persentase)														
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan	Persen	99.8	94.29	95.24		96.19		98.10		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pengembangan Wilayah (Persentase)														
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.446.182.454,00		1.475.597.806,00		1.513.048.478,00		1.554.188.266,00		1.607.714.511,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						1.446.182.454,00		1.475.597.806,00		1.513.048.478,00		1.554.188.266,00		1.607.714.511,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kemanfaatan Riset	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti (Persentase)	Persen	-	88.00	88.00	919.532.654,00	88.00	938.235.949,00	88.00	962.048.377,00	88.00	988.206.472,00	88.00	1.022.240.304,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah (Skor)	Skor	88.84	88.86	89	526.649.800,00	89.11	537.361.857,00	89.20	551.000.101,00	89.30	565.981.794,00	89.40	585.474.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN						13.481.650.956,00		13.755.858.803,00		14.104.991.662,00		14.488.461.833,00		14.987.377.808,00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah				Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah		Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Ketentuan Perundangan			
					Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Partisipatif Masyarakat	Persentase Usulan Masyarakat yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data	Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian		Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian		Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pembangunan Manusia			
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur		Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			dan Pengembangan Wilayah		Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Meningkatnya Kemanfaatan Riset		Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Kemanfaatan Riset	Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
				Meningkatnya Kualitas Penelitian	Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tematis melalui Jaringan Penelitian		Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Meningkatnya Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pembangunan		Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Pengendalian Lintas Sektor	Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan			Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Daerah yang Baik dan Adaptif					
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda		Nilai SAKIP Bappeda	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Bappeda	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Bappeda	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bappeda	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Bappeda	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01 - PERENCANAAN							12.035.468.502,00		12.280.260.997,00		12.591.943.184,00		12.934.273.567,00		13.379.663.297,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.374.928.660,00		10.132.587.120,00		10.338.675.008,00		10.601.079.739,00		10.889.278.547,00		11.264.238.649,00		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda	Nilai IKM Bappeda	Nilai	89.04	89.14		89.24		89.34		89.44		89.54		89.64		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Nilai SPIP Bappeda	Nilai	Optimum (4,65)	Optimum (4,66-5)		Optimum (4,67-5)		Optimum (4,69-5)		Optimum (4,7-5)		Optimum (4,71-5)		Optimum (4,72-5)			
	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	A (89.23)	A (89,24-90,00)		A (89,25-90,00)		A (89,26-90,00)		A (89,27-90,00)		A (89,28-90,00)		A (89,30-90,00)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					44.246.000,00		21.274.000,00		21.706.715,00		22.257.630,00		22.862.817,00		23.650.212,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda	Persen	100	100	44.246.000,00	100	21.274.000,00	100	21.706.715,00	100	22.257.630,00	100	22.862.817,00	100	23.650.212,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bappeda	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	44.246.000,00	1	21.274.000,00	1	21.706.715,00	1	22.257.630,00	1	22.862.817,00	1	23.650.212,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	8		6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	3		3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perangkat Daerah																
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.650.000,00		4.950.000,00		5.050.683,00		5.178.869,00		5.319.683,00		5.502.893,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	3	7.650.000,00	3	4.950.000,00	3	5.050.683,00	3	5.178.869,00	3	5.319.683,00	3	5.502.893,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.530.000,00		990.000,00		1.010.137,00		1.035.774,00		1.063.937,00		1.100.579,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.530.000,00	1	990.000,00	1	1.010.137,00	1	1.035.774,00	1	1.063.937,00	1	1.100.579,00		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.530.000,00		990.000,00		1.010.137,00		1.035.774,00		1.063.937,00		1.100.579,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	1.530.000,00	1	990.000,00	1	1.010.137,00	1	1.035.774,00	1	1.063.937,00	1	1.100.579,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD																
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.530.000,00		990.000,00		1.010.137,00		1.035.774,00		1.063.937,00		1.100.579,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.530.000,00	1	990.000,00	1	1.010.137,00	1	1.035.774,00	1	1.063.937,00	1	1.100.579,00		
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.530.000,00		990.000,00		1.010.137,00		1.035.774,00		1.063.937,00		1.100.579,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	1.530.000,00	1	990.000,00	1	1.010.137,00	1	1.035.774,00	1	1.063.937,00	1	1.100.579,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD																
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					28.451.000,00		10.879.000,00		11.100.279,00		11.382.004,00		11.691.481,00		12.094.135,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	8	28.451.000,00	6	10.879.000,00	6	11.100.279,00	6	11.382.004,00	6	11.691.481,00	6	12.094.135,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja					2.025.000,00		1.485.000,00		1.515.205,00		1.553.661,00		1.595.905,00		1.650.868,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.025.000,00	1	1.485.000,00	1	1.515.205,00	1	1.553.661,00	1	1.595.905,00	1	1.650.868,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.386.061.000,00		8.802.622.000,00		8.981.658.392,00		9.209.622.048,00		9.459.987.116,00		9.785.722.426,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Nilai	5	5	9.386.061.000,00	5	8.802.622.000,00	5	8.981.658.392,00	5	9.209.622.048,00	5	9.459.987.116,00	5	9.785.722.426,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	55		55		55		55		55		55			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif	Dokumen	1	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	ikasi Keuangan SKPD																
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.372.867.000,00		8.795.637.000,00		8.974.531.318,00		9.202.314.088,00		9.452.480.453,00		9.777.957.233,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	55	9.372.867.000,00	55	8.795.637.000,00	55	8.974.531.318,00	55	9.202.314.088,00	55	9.452.480.453,00	55	9.777.957.233,00		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif					8.970.000,00		4.719.000,00		4.814.984,00		4.937.189,00		5.071.431,00		5.246.091,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ikasi Keuangan SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	12	8.970.000,00	12	4.719.000,00	12	4.814.984,00	12	4.937.189,00	12	5.071.431,00	12	5.246.091,00		
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					897.000,00		429.000,00		437.726,00		448.835,00		461.039,00		476.917,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	897.000,00	1	429.000,00	1	437.726,00	1	448.835,00	1	461.039,00	1	476.917,00		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					414.000,00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.116,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	414.000,00	1	198.000,00	1	202.027,00	1	207.155,00	1	212.787,00	1	220.116,00		
5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					429.000,00		198.000,00		202.027,00		207.155,00		212.787,00		220.116,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	429.000,00	1	198.000,00	1	202.027,00	1	207.155,00	1	212.787,00	1	220.116,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan					1.587.000,00		1.012.000,00		1.032.584,00		1.058.791,00		1.087.580,00		1.125.036,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	4	1.587.000,00	4	1.012.000,00	4	1.032.584,00	4	1.058.791,00	4	1.087.580,00	4	1.125.036,00		
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					897.000,00		429.000,00		437.726,00		448.835,00		461.039,00		476.917,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	Dokumen	1	1	897.000,00	1	429.000,00	1	437.726,00	1	448.835,00	1	461.039,00	1	476.917,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran																
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.880.000,00		5.995.000,00		6.116.941,00		6.272.186,00		6.442.727,00		6.664.613,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Nilai	5	5	12.880.000,00	5	5.995.000,00	5	6.116.941,00	5	6.272.186,00	5	6.442.727,00	5	6.664.613,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	1	2		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Daerah pada SKPD																
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2		1		1		1		1		1			
5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					805.000,000		275.000,00		280.594,00		287.715,00		295.538,00		305.716,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	805.000,000	1	275.000,00	1	280.594,00	1	287.715,00	1	295.538,00	1	305.716,00		
5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					805.000,000		275.000,00		280.594,00		287.715,00		295.538,00		305.716,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2	805.000,000	1	275.000,00	1	280.594,00	1	287.715,00	1	295.538,00	1	305.716,00		
5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					805.000,000		275.000,00		280.594,00		287.715,00		295.538,00		305.716,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	Laporan	1	1	805.000,000	1	275.000,00	1	280.594,00	1	287.715,00	1	295.538,00	1	305.716,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					8.855.000,00		4.620.000,00		4.713.971,00		4.833.611,00		4.965.037,00		5.136.033,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11	8.855.000,00	1	4.620.000,00	1	4.713.971,00	1	4.833.611,00	1	4.965.037,00	1	5.136.033,00		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					805.000,000		275.000,00		280.594,00		287.715,00		295.538,00		305.716,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	1	2	805.000,000	1	275.000,00	1	280.594,00	1	287.715,00	1	295.538,00	1	305.716,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD																
5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					805.000,000		275.000,00		280.594,00		287.715,00		295.538,00		305.716,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	805.000,000	1	275.000,00	1	280.594,00	1	287.715,00	1	295.538,00	1	305.716,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					74.730.000,00		77.400.000,00		78.974.316,00		80.978.684,00		83.180.495,00		86.045.231,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Bappeda	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	Nilai	91	87,82 - 91,2	74.730.000,00	87,84 - 91,4	77.400.000,00	87,86 - 91,6	78.974.316,00	87,88 - 91,8	80.978.684,00	87,90 - 92	83.180.495,00	87,92 - 92,2	86.045.231,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	74.730.000,00	1	77.400.000,00	1	78.974.316,00	1	80.978.684,00	1	83.180.495,00	1	86.045.231,00		
5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan					74.730.000,00		77.400.000,00		78.974.316,00		80.978.684,00		83.180.495,00		86.045.231,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penilaian Kinerja Pegawai																	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	74.730.000,00	1	77.400.000,00	1	78.974.316,00	1	80.978.684,00	1	83.180.495,00	1	86.045.231,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					313.044.260,00		386.315.320,00		394.172.974,00		404.177.083,00		415.166.659,00		429.464.997,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda	Nilai	90,67	90,72	313.044.260,00	90,77	386.315.320,00	90,82	394.172.974,00	90,87	404.177.083,00	90,92	415.166.659,00	90,97	429.464.997,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	313.044.260,00	1	386.315.320,00	1	394.172.974,00	1	404.177.083,00	1	415.166.659,00	1	429.464.997,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	12		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Undangan yang Disediakan																
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	3		2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	3		3		3		3		3		3			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran					12.921.880,00		10.646.000,00		10.862.540,00		11.138.231,00		11.441.079,00		11.835.110,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
gan Bangunan Kantor																	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	12.921.880,00	1	10.646.000,00	1	10.862.540,00	1	11.138.231,00	1	11.441.079,00	1	11.835.110,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					68.180.840,00		117.941.300,00		120.340.226,00		123.394.461,00		126.749.556,00		131.114.811,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	3	68.180.840,00	3	117.941.300,00	3	120.340.226,00	3	123.394.461,00	3	126.749.556,00	3	131.114.811,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.680.800,00		9.641.000,00		9.837.098,00		10.086.763,00		10.361.023,00		10.717.856,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	3	18.680.800,00	3	9.641.000,00	3	9.837.098,00	3	10.086.763,00	3	10.361.023,00	3	10.717.856,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.656.740,00		33.993.020,00		34.684.438,00		35.564.729,00		36.531.734,00		37.789.887,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	40.656.740,00	1	33.993.020,00	1	34.684.438,00	1	35.564.729,00	1	36.531.734,00	1	37.789.887,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.964.000,00		2.964.000,00		3.024.288,00		3.101.044,00		3.185.362,00		3.295.065,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12	2.964.000,00	1	2.964.000,00	1	3.024.288,00	1	3.101.044,00	1	3.185.362,00	1	3.295.065,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					169.640.000,00		211.130.000,00		215.424.384,00		220.891.855,00		226.897.905,00		234.712.268,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	3	169.640.000,00	2	211.130.000,00	2	215.424.384,00	2	220.891.855,00	2	226.897.905,00	2	234.712.268,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					117.358.400,00		121.900.000,00		124.379.446,00		127.536.196,00		131.003.906,00		135.515.680,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Nilai	5	5	117.358.400,00	5	121.900.000,00	5	124.379.446,00	5	127.536.196,00	5	131.003.906,00	5	135.515.680,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50	117.358.400,00	1	121.900.000,00	1	124.379.446,00	1	127.536.196,00	1	131.003.906,00	1	135.515.680,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					117.358.400,00		121.900.000,00		124.379.446,00		127.536.196,00		131.003.906,00		135.515.680,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	50	117.358.400,00	1	121.900.000,00	1	124.379.446,00	1	127.536.196,00	1	131.003.906,00	1	135.515.680,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan																
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.240.000,00		130.156.000,00		132.803.373,00		136.173.923,00		139.876.492,00		144.693.838,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda	Persen	100	100	124.240.000,00	100	130.156.000,00	100	132.803.373,00	100	136.173.923,00	100	139.876.492,00	100	144.693.838,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	124.240.000,00	1	130.156.000,00	1	132.803.373,00	1	136.173.923,00	1	139.876.492,00	1	144.693.838,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2		1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.500.000,00		5.500.000,00		5.611.870,00		5.754.299,00		5.910.759,00		6.114.325,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.611.870,00	1	5.754.299,00	1	5.910.759,00	1	6.114.325,00		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.820.000,00		2.940.000,00		2.999.800,00		3.075.935,00		3.159.569,00		3.268.385,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	2.820.000,00	1	2.940.000,00	1	2.999.800,00	1	3.075.935,00	1	3.159.569,00	1	3.268.385,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan					115.920.000,00		121.716.000,00		124.191.703,00		127.343.689,00		130.806.164,00		135.311.128,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	115.920.000,00	1	121.716.000,00	1	124.191.703,00	1	127.343.689,00	1	130.806.164,00	1	135.311.128,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.369.000,00		586.924.800,00		598.862.851,00		614.061.989,00		630.758.335,00		652.481.652,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Nilai	5	5	302.369.000,00	5	586.924.800,00	5	598.862.851,00	5	614.061.989,00	5	630.758.335,00	5	652.481.652,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	50		7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	2	2		25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	24		1		1		1		1		1			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					27.240.000,00		26.940.000,00		27.487.960,00		28.185.604,00		28.951.971,00		29.949.076,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	24	27.240.000,00	1	26.940.000,00	1	27.487.960,00	1	28.185.604,00	1	28.951.971,00	1	29.949.076,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					98.742.000,00		81.084.800,00		82.734.065,00		84.833.855,00		87.140.488,00		90.141.606,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	98.742.000,00	25	81.084.800,00	25	82.734.065,00	25	84.833.855,00	25	87.140.488,00	25	90.141.606,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Operasional atau Lapangan																	
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.835.000,00		59.900.000,00		61.118.366,00		62.669.550,00		64.373.535,00		66.590.560,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	50	40.835.000,00	7	59.900.000,00	7	61.118.366,00	7	62.669.550,00	7	64.373.535,00	7	66.590.560,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					135.552.000,00		419.000.000,00		427.522.460,00		438.372.980,00		450.292.341,00		465.800.410,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	135.552.000,00	1	419.000.000,00	1	427.522.460,00	1	438.372.980,00	1	450.292.341,00	1	465.800.410,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA					881.367.838,00		478.724.574,00		488.461.831,00		500.858.995,00		514.477.350,00		532.195.950,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
N DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pembangunan	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	Persen	-	75	206.910.972,00	83.33	193.808.900,00	91.67	197.750.973,00	100	202.769.893,00	100	208.283.207,00	100	215.456.479,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					206.910.972,00		193.808.900,00		197.750.973,00		202.769.893,00		208.283.207,00		215.456.479,00		
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Lintas Sektor	Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor	Persen	100	100	206.910.972,00	100	193.808.900,00	100	197.750.973,00	100	202.769.893,00	100	208.283.207,00	100	215.456.479,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	Laporan	6	6	206.910.972,00	6	193.808.900,00	6	197.750.973,00	6	202.769.893,00	6	208.283.207,00	6	215.456.479,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pembangunan Daerah																
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	4		3		3		3		3		3			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					52.132.488,00		40.929.616,00		41.762.124,00		42.822.047,00		43.986.379,00		45.501.269,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	4	52.132.488,00	3	40.929.616,00	3	41.762.124,00	3	42.822.047,00	3	43.986.379,00	3	45.501.269,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					154.778.484,00		152.879.284,00		155.988.849,00		159.947.846,00		164.296.828,00		169.955.210,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	6	6	154.778.484,00	6	152.879.284,00	6	155.988.849,00	6	159.947.846,00	6	164.296.828,00	6	169.955.210,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Persen	92.87	92.9		92.92	284.915.674,00	92.93	290.710.858,00	92.95	298.089.102,00	92.97	306.194.143,00	93	316.739.471,00		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					486.261.192,00		226.251.552,00		230.853.508,00		236.712.572,00		243.148.786,00		251.522.831,00		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	486.261.192,00	100	170.502.720,00	100	173.970.745,00	100	178.386.124,00	100	183.236.442,00	100	189.547.106,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Perundangan	(RPJPD, RPJMD, RKPD)																
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	2	486.261.192,00	1	170.502.720,00	1	173.970.745,00	1	178.386.124,00	1	183.236.442,00	1	189.547.106,00		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1	6		4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2			
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					25.071.344,00		13.873.744,00		14.155.936,00		14.515.214,00		14.909.882,00		15.423.379,00		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2	25.071.344,00	2	13.873.744,00	2	14.155.936,00	2	14.515.214,00	2	14.909.882,00	2	15.423.379,00		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik					11.020.000,00		10.010.000,00		10.213.603,00		10.472.825,00		10.757.581,00		11.128.072,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	2	11.020.000,00	1	10.010.000,00	1	10.213.603,00	1	10.472.825,00	1	10.757.581,00	1	11.128.072,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					39.540.000,00		29.580.000,00		30.181.657,00		30.947.668,00		31.789.135,00		32.883.953,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2	39.540.000,00	1	29.580.000,00	1	30.181.657,00	1	30.947.668,00	1	31.789.135,00	1	32.883.953,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					410.629.848,00		117.038.976,00		119.419.549,00		122.450.417,00		125.779.844,00		130.111.702,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1	6	410.629.848,00	4	117.038.976,00	4	119.419.549,00	4	122.450.417,00	4	125.779.844,00	4	130.111.702,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta	Persen	100	100	130.787.552,00	100	55.748.832,00	100	56.882.763,00	100	58.326.448,00	100	59.912.344,00	100	61.975.725,00		
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3		130.787.552,00	2	55.748.832,00	2	56.882.763,00	2	58.326.448,00	2	59.912.344,00	2	61.975.725,00		
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					130.787.552,00		55.748.832,00		56.882.763,00		58.326.448,00		59.912.344,00		61.975.725,00		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai	Dokumen	3	2	130.787.552,00	2	55.748.832,00	2	56.882.763,00	2	58.326.448,00	2	59.912.344,00	2	61.975.725,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)																
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					57.408.122,00		58.664.122,00		59.857.350,00		61.376.530,00		63.045.357,00		65.216.640,00		
Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data	Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	57.408.122,00	100	58.664.122,00	100	59.857.350,00	100	61.376.530,00	100	63.045.357,00	100	65.216.640,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	2		2	58.664.122,00	2	59.857.350,00	2	61.376.530,00	2	63.045.357,00	2	65.216.640,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1		1		1		1		1		1			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					46.550.872,00		48.956.872,00		49.952.655,00		51.220.453,00		52.613.137,00		54.425.134,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	2	46.550.872,00	2	48.956.872,00	2	49.952.655,00	2	51.220.453,00	2	52.613.137,00	2	54.425.134,00		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					10.857.250,00		9.707.250,00		9.904.695,00		10.156.077,00		10.432.220,00		10.791.506,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	10.857.250,00	1	9.707.250,00	1	9.904.695,00	1	10.156.077,00	1	10.432.220,00	1	10.791.506,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.582.731.316,00		1.424.156.808,00		1.453.124.158,00		1.490.004.450,00		1.530.517.670,00		1.583.228.698,00		
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	Persen	-	93.33	686.423.536,00	95.00	770.198.000,00	96.67	785.863.827,00	98.33	805.809.052,00	100	827.719.000,00	100	856.225.641,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra	Persen	-	94.29		95.24		96.19		98.10		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah																
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					686.423.536,00		770.198.000,00		785.863.827,00		805.809.052,00		827.719.000,00		856.225.641,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	Persen	100	100	161.257.048,00	100	142.322.000,00	100	145.216.829,00	100	148.902.433,00	100	152.951.090,00	100	158.218.725,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	9	9		9		9		9		9		9			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Daerah Bidang Infrastruktur																
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					161.257.048,00		142.322.000,00		145.216.829,00		148.902.433,00		152.951.090,00		158.218.725,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	9	9	161.257.048,00	9	142.322.000,00	9	145.216.829,00	9	148.902.433,00	9	152.951.090,00	9	158.218.725,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang	Persen	100	100	525.166.488,00	100	627.876.000,00	100	640.646.998,00	100	656.906.619,00	100	674.767.910,00	100	698.006.916,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Pengembangan Wilayah	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu																
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	5		4		4		4		4		4			
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					525.166.488,00		627.876.000,00		640.646.998,00		656.906.619,00		674.767.910,00		698.006.916,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	5	525.166.488,00	4	627.876.000,00	4	640.646.998,00	4	656.906.619,00	4	674.767.910,00	4	698.006.916,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	Persen	-	82	494.489.980,00	83	405.247.608,00	88	413.490.345,00	92	423.984.730,00	95	435.512.874,00	92	450.511.938,00		
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	85.94		87.5		89.06		90.63		92.19		92.97			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					494.489.980,00		405.247.608,00		413.490.345,00		423.984.730,00		435.512.874,00		450.511.938,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	Persen	100	100	177.660.492,00	100	161.584.992,00	100	164.871.631,00	100	169.056.073,00	100	173.652.707,00	100	179.633.307,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	177.660.492,00	4	161.584.992,00	4	164.871.631,00	4	169.056.073,00	4	173.652.707,00	4	179.633.307,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Laporan	6	6		6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pembangunan Manusia																
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					69.492.760,00		64.064.260,00		65.367.327,00		67.026.350,00		68.848.796,00		71.219.949,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	69.492.760,00	4	64.064.260,00	4	65.367.327,00	4	67.026.350,00	4	68.848.796,00	4	71.219.949,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen					108.167.732,00		97.520.732,00		99.504.304,00		102.029.723,00		104.803.911,00		108.413.358,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	108.167.732,00	6	97.520.732,00	6	99.504.304,00	6	102.029.723,00	6	104.803.911,00	6	108.413.358,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu	Persen	100	100	316.829.488,00	100	243.662.616,00	100	248.618.714,00	100	254.928.657,00	100	261.860.167,00	100	270.878.631,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	4		3		3		3		3		3			
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					316.829.488,00		243.662.616,00		248.618.714,00		254.928.657,00		261.860.167,00		270.878.631,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	4	316.829.488,00	3	243.662.616,00	3	248.618.714,00	3	254.928.657,00	3	261.860.167,00	3	270.878.631,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	Persen	-	80	401.817.800,00	84	248.711.200,00	87	253.769.986,00	92	260.210.668,00	95	267.285.796,00	96	276.491.119,00		
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Persen	-	89.77		90.91		92.05		93.18		94.32		95.45			
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					401.817.800,00		248.711.200,00		253.769.986,00		260.210.668,00		267.285.796,00		276.491.119,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun	Persen	100	100	181.902.800,00	100	150.797.700,00	100	153.864.925,00	100	157.770.017,00	100	162.059.784,00	100	167.641.123,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Lengkap dan Tepat Waktu																
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	9	181.902.800,00	9	150.797.700,00	9	153.864.925,00	9	157.770.017,00	9	162.059.784,00	9	167.641.123,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					181.902.800,00		150.797.700,00		153.864.925,00		157.770.017,00		162.059.784,00		167.641.123,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	9	181.902.800,00	9	150.797.700,00	9	153.864.925,00	9	157.770.017,00	9	162.059.784,00	9	167.641.123,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu	Persen	100	100	219.915.000,00	100	97.913.500,00	100	99.905.061,00	100	102.440.651,00	100	105.226.012,00	100	108.849.996,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	2		2		2		2		2		2			
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					219.915.000,00		97.913.500,00		99.905.061,00		102.440.651,00		105.226.012,00		108.849.996,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	2	219.915.000,00	2	97.913.500,00	2	99.905.061,00	2	102.440.651,00	2	105.226.012,00	2	108.849.996,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.720.467.516,00		1.446.182.454,00		1.475.597.806,00		1.513.048.478,00		1.554.188.266,00		1.607.714.511,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.720.467.516,00		1.446.182.454,00		1.475.597.806,00		1.513.048.478,00		1.554.188.266,00		1.607.714.511,00		
Meningkatnya Kemanfaatan Riset	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	Persen	-	90	128.494.034,00	92.5	919.532.654,00	94	938.235.949,00	94	962.048.377,00	95	988.206.472,00	95	1.022.240.304,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang					128.494.034,00		122.974.034,00		125.475.326,00		128.659.889,00		132.158.152,00		136.709.679,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	
Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis	Persen	100	100	128.494.034,00	100	122.974.034,00	100	125.475.326,00	100	128.659.889,00	100	132.158.152,00	100	136.709.679,00		
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2			
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan					17.993.172,00		12.837.172,00		13.098.280,00		13.430.714,00		13.795.896,00		14.271.026,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Data Kelitbangan dan Peraturan																	
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	2	2	17.993.172,00	2	12.837.172,00	2	13.098.280,00	2	13.430.714,00	2	13.795.896,00	2	14.271.026,00		
5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan					110.500.862,00		110.136.862,00		112.377.046,00		115.229.175,00		118.362.256,00		122.438.653,00		
Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Dokumen	1	1	110.500.862,00	1	110.136.862,00	1	112.377.046,00	1	115.229.175,00	1	118.362.256,00	1	122.438.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					609.772.034,00		490.387.172,00		500.361.647,00		513.060.826,00		527.010.950,00		545.161.207,00		
Meningkatnya Kualitas Penelitian Tematis melalui Jaringan Penelitian	Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan	Persen	14,29	25,00	609.772.034,00	35,00	490.387.172,00	45,00	500.361.647,00	55,00	513.060.826,00	65,00	527.010.950,00	75,00	545.161.207,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	8	8		8		8		8		8		8			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen	1	1	152.136.862,00		-		-		-		-		-		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen			152.136.862,00		-		-		-		-		-		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan					457.635.172,00		490.387.172,00		500.361.647,00		513.060.826,00		527.010.950,00		545.161.207,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	8	8	457.635.172,00	8	490.387.172,00	8	500.361.647,00	8	513.060.826,00	8	527.010.950,00	8	545.161.207,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					605.731.448,00		306.171.448,00		312.398.976,00		320.327.662,00		329.037.370,00		340.369.418,00		
Meningkatnya Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Penelitian	0	1	605.731.448,00	2	306.171.448,00	3	312.398.976,00	3	320.327.662,00	3	329.037.370,00	3	340.369.418,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2			
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					302.865.724,00		153.085.724,00		156.199.488,00		160.163.831,00		164.518.685,00		170.184.709,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	2	302.865.724,00	2	153.085.724,00	2	156.199.488,00	2	160.163.831,00	2	164.518.685,00	2	170.184.709,00		
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman							153.085.724,00		156.199.488,00		160.163.831,00		164.518.685,00		170.184.709,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	2	302.865.724,00	2	153.085.724,00	2	156.199.488,00	2	160.163.831,00	2	164.518.685,00	2	170.184.709,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah	Skor	88.84	88.86	376.470.000,00	89	526.649.800,00	89.11	537.361.857,00	89.20	551.000.101,00	89.30	565.981.794,00	89.40	585.474.207,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi					376.470.000,00		526.649.800,00		537.361.857,00		551.000.101,00		565.981.794,00		585.474.207,00		
Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota	Inovasi	153	153	376.470.000,00	154	526.649.800,00	155	537.361.857,00	156	551.000.101,00	157	565.981.794,00	158	585.474.207,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	3	376.470.000,00	3	526.649.800,00	3	537.361.857,00	3	551.000.101,00	3	565.981.794,00	3	585.474.207,00		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan					376.470.000,00		526.649.800,00		537.361.857,00		551.000.101,00		565.981.794,00		585.474.207,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*		*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Daerah yang Bersifat Inovatif																	
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	3	376.470.000,00	3	526.649.800,00	3	537.361.857,00	3	551.000.101,00	3	565.981.794,00	3	585.474.207,00		

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1.	Penguatan akses pendanaan pembangunan	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Penguatan akses pendanaan pembangunan	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
3.	Penguatan akses pendanaan pembangunan	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Kemanfaatan Riset	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
4.	Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Bappeda Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.5 Indikator kinerja utama rancangan akhir renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
2.	Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah	Persentase	100	80	80	100	100	100	100	
3.	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	-	85,41	88,61	91,98	95,48	96,34	96,55	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda	Nilai	AA (92,12)	AA (92,14 - 95,14)	AA (92,16 - 95,16)	AA (92,18 - 95,18)	AA (92,20 - 95,20)	AA (92,22 - 95,22)	AA (92,24 - 95,24)	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Bappeda Kota Yogyakarta tidak menentukan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V
PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Yogyakarta.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

Pohon Kinerja Bappeda 2025-2029

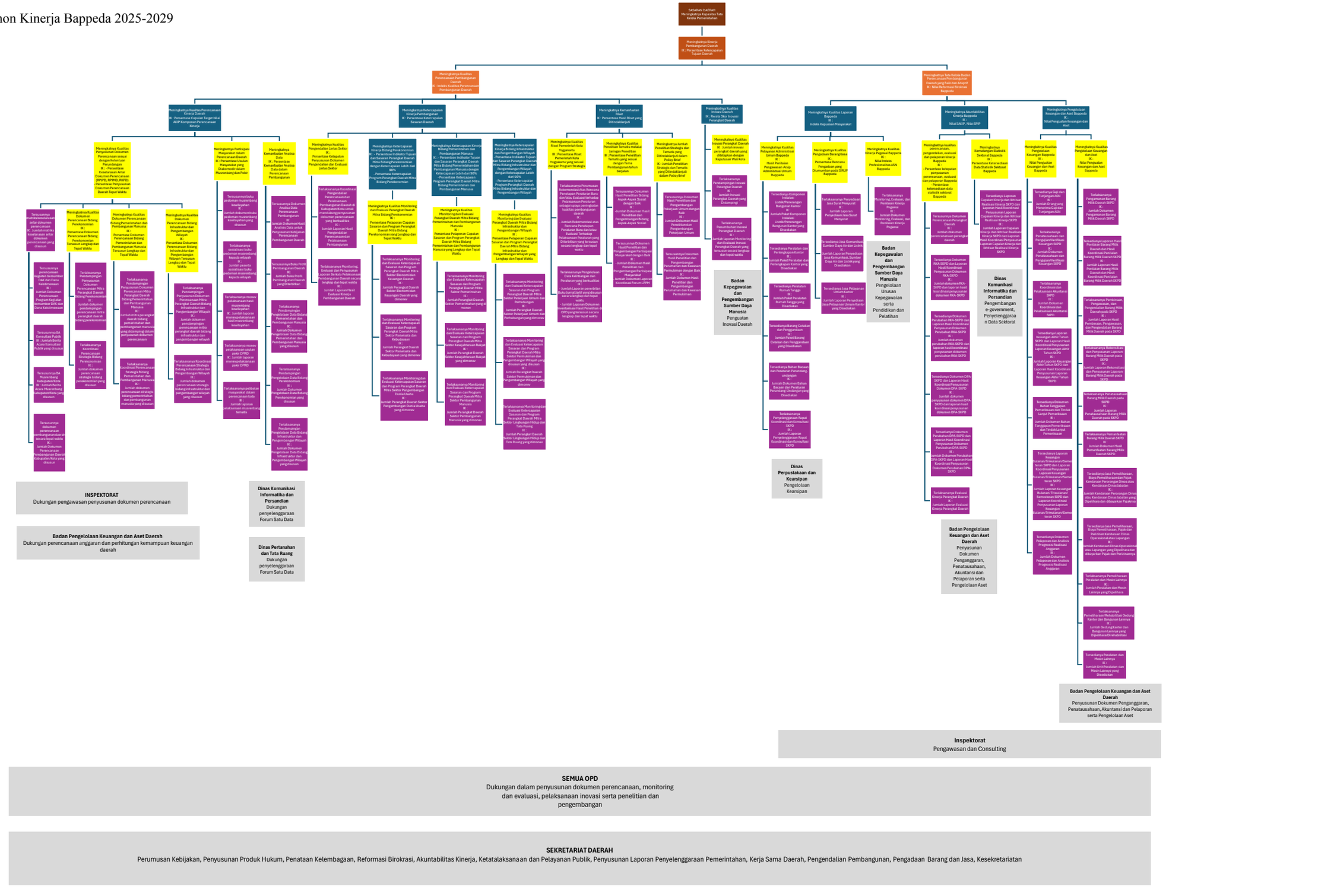
SASARAN DAERAH
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah
IK : Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif
IK : Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah
IK : Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pembangunan
IK : Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah
Meningkatnya Kemandirian
IK : Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
IK : Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Bappeda
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda
IK : Nilai SAKIP, Nilai SPIP
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda
IK : Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Perundangan
IK : - Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah
IK : Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Musrenbang dan Pokir
Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data
IK : Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Lintas Sektor
IK : Persentase Kelengkapan Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian
IK : - Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90%
- Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : - Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90%
- Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90%
Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta
IK : Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis
Meningkatnya Kualitas Penelitian Tematis melalui Jaringan Penelitian
IK : Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan
Meningkatnya Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief
IK : Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief
Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah
IK : Jumlah inovasi perangkat daerah yang diteliti/akan dengan Kepulauan Wali Kota
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Bappeda
IK : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang/Jasa
IK : Persentasi Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda
Meningkatnya Kualitas Inovasi Pegawai Bappeda
IK : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda
IK : - Persentase kelengkapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda
- Predikat keterwujudan data statistik sektoral Bappeda
Meningkatnya Kemampuan Statistik Sektoral Bappeda
IK : Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Bappeda
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Bappeda
IK : Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
IK : Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda
Tersusunnya rumbris kesetaraan antar dokumen perencanaan RJPD dan Data Kesetimpasan
Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda dan hasil Evaluasi dan Data Kesetimpasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Tercantum OVE dan Data Kesetimpasan
Tersusunnya BA Konsultasi Publik
IK : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik yang disusun
Tersusunnya BA Musrenbang Kabupaten/Kota
IK : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota yang disusun
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan air secara tepat waktu
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : Jumlah mitra perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang didampingi dalam penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang disusun
Tersusunnya buku pedoman musrenbang kewilayahan
IK : Jumlah dokumen buku pedoman musrenbang kewilayahan yang disusun
Terlaksananya sosialisasi buku pedoman musrenbang kepada wilayah
IK : Jumlah peserta sosialisasi buku pedoman musrenbang kepada wilayah
Terlaksananya monev pelaksanaan hasil musrenbang kewilayahan
IK : Jumlah laporan monev pelaksanaan musrenbang kewilayahan hasil musrenbang kewilayahan
Terlaksananya monev pelaksanaan usulan pokir DPRD
IK : Jumlah laporan monev pelaksanaan pokir DPRD
Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota
IK : Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kemalis
Tersusunnya Dokumen Analisa Data Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Terlaksananya Pendampingan pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun
Terlaksananya Pendampingan pengelolaan Data Bidang Perekonomian
IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Perekonomian yang disusun
Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun
Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
IK : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara lengkap dan tepat waktu
IK : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian
IK : - Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomian
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Ekonomian Kewangan Daerah yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pemerintah dan Kebudayaan
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pemerintah dan Kebudayaan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pengembangan Dunia Usaha
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pengembangan Dunia Usaha yang dimonev
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : - Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pemerintahan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Kesehatan Rakyat
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Kesejahteraan Rakyat yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pembangunan Manusia
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Manusia yang dimonev
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang disusun yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang dimonev
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang dimonev
Terlaksananya Penumbuhan Inovasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Pendampingan Inovasi Perangkat Daerah yang Estampingi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan
Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang berkualitas
- Jumlah Laporan penelitian Buku Jurnal Jadi yang disusun secara lengkap dan tepat waktu
- Jumlah Laporan Dokumen rekomendasi Hasil Penelitian di OPD yang berasaan secara lengkap dan tepat waktu
Terlaksananya Rekomendasi atas Rencana Penelapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di daerah
- Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penelapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan yang berasaan secara lengkap dan tepat waktu
Terlaksananya Penyusunan Jasa Sosial Menyurat
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai
IK : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Data Statistik Sektoral Bappeda
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Gubernur/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Gubernur/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pemtinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit/Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi/penyusunan dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pemtinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit/Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Perundangan
IK : - Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu
Tersusunnya perencanaan kegiatan dan hasil evaluasi dan data kesetimpasan
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
IK : Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang perekonomian
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Perekonomian
IK : Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang perekonomian yang disusun
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang disusun
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian
IK : - Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Ekonomian Kewangan Daerah
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Ekonomian Kewangan Daerah yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pemerintah dan Kebudayaan
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pemerintah dan Kebudayaan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pengembangan Dunia Usaha
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pengembangan Dunia Usaha yang dimonev
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IK : - Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pemerintahan
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pemerintahan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Kesehatan Rakyat
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Kesejahteraan Rakyat yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pembangunan Manusia
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Manusia yang dimonev
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : - Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang disusun yang dimonev
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang dimonev
IK : Jumlah Perangkat Daerah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang dimonev
Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta
IK : Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis
Terlaksananya Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penelapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di daerah
- Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penelapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan yang berasaan secara lengkap dan tepat waktu
Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang berkualitas
- Jumlah Laporan penelitian Buku Jurnal Jadi yang disusun secara lengkap dan tepat waktu
- Jumlah Laporan Dokumen rekomendasi Hasil Penelitian di OPD yang berasaan secara lengkap dan tepat waktu
Meningkatnya Kualitas Penelitian Tematis melalui Jaringan Penelitian
IK : Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan
Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan Baik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Baik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Forum LPPM
Meningkatnya Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief
IK : Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief
Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum dengan Baik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum
Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dengan Baik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasan Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Bappeda
IK : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang/Jasa
IK : Persentasi Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda
Meningkatnya Kualitas Inovasi Pegawai Bappeda
IK : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda
IK : - Persentase kelengkapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda
- Predikat keterwujudan data statistik sektoral Bappeda
Meningkatnya Kemampuan Statistik Sektoral Bappeda
IK : Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Bappeda
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Bappeda
IK : Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
IK : Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Gubernur/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Gubernur/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pemtaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemtaan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pemtinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit/Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah
IK : Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah
IK : Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Musrenbang dan Pokir
Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data
IK : Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Lintas Sektor
IK : Persentase Kelengkapan Penyusunan D

CASCADING RAPPEDA TAHUN 2025-2029

No.	Nama Perangkat Daerah	Tujuan Tolls: Tujuan / Sasaran Operasional pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Indikator Kinerja Tolls: Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Operasional pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Formula Perhitungan Tolls:cara mengukurnya indikator tujuan	Target					Sasaran Strategis Tolls: Sasaran Strategis / Operasional pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Indikator Kinerja Tolls: Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Operasional pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Formula Perhitungan Tolls:cara mengukurnya indikator sasaran	Target					Program Tolls: Program yang akandi dukung oleh Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Sasaran Program Tolls: Sasaran Program /Intervensidari Outcome/Of pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Indikator Kinerja Tolls: Indikator Sasaran Program /Intervensidari Outcome/OP pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Formula Perhitungan Tolls:cara mengukurnya indikator program	Pelaporan Tolls: Nama Bidang Yang mengampu indikator tersebut	Target					Kegiatan Tolls: Nama Kegiatan yang akandi dukung oleh Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Sasaran Kegiatan Tolls: Sasaran Kegiatan /Intervensidari Output pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Indikator Kinerja Tolls: Indikator Sasaran Kegiatan/Indeks/Outcome pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Formula Perhitungan Tolls:cara mengukurnya indikator kegiatan	Pelaporan Tolls: Nama Bidang/Subid Yang mengampu indikator kegiatan	Target					Sub Kegiatan Tolls:Nama Subkegiatan yang akandi dukung oleh Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Sasaran Operasional (Sub) Tolls: Sasaran Operasional pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Indikator Kinerja (Sub Output) Tolls: Indikator Kinerja Output pada Perangkat Daerah yang mengampu Tujuan/ sasaran jika bersifat cascading	Pelaporan Tolls: Nama Sub(Kelrina Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	Target					
					2026	2026	2027	2028	2029	2030				2026	2026	2027	2028	2029	2030							2026	2026	2027	2028	2029	2030							2026	2026	2027	2028	2029	2030
1	BAPPEDA	Meningkatkanya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah	Jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 80% dibagi jumlah seluruh indikator tujuan daerah dikali 100%	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Komponen nilai kualitas perencanaan kinerja - pemerintah kota yogyakarta + 30% ketercapaian sasaran daerah + 20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 80% + 20% ketercapaian program perangkat daerah	85,41	86,61	91,66	95,48	96,34	96,55	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	(Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja dibagi bobot perencanaan kinerja) x 100 kali 100%	Kepala Bidang PTD	92,8	92,92	92,93	92,95	92,97	93	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Perundangan	Persentase Dokumen Perencanaan Ardite Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah program pada RKPD dibagi jumlah program pada RPJMD X 100%	Kepala Bidang PPD	100	100	100	100	100	100	Tersusunnya matriks keselarasan antar dokumen perencanaan	Jumlah matrik keselarasan antar dokumen perencanaan yang disusun	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																								Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan X 100%	Kepala Bidang PPD	100	100	100	100	100	100		Tersusunnya perencanaan kegiatan bersumber DAK dan Dana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Perangkat Daerah bersumber DAK dan Dana Keistimewaan	Ketua Tim Kerja Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersusunnya BA Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik yang disusun	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pendanaan APBD	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara
																																Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	Tersusunnya BA Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota yang disusun	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pendanaan APBD	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara
																																Koordinasi Penyusunan dan Penelaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya buku pedoman musrenbang kewilayahan yang disusun	Jumlah dokumen buku pedoman musrenbang kewilayahan yang disusun	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pendanaan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya sosialisasi buku pedoman musrenbang kepada wilayah	Jumlah peserta sosialisasi buku pedoman musrenbang kepada wilayah	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD						
																																				Terlaksananya monev pelaksanaan hasil musrenbang kewilayahan	Jumlah laporan monev pelaksanaan hasil musrenbang kewilayahan	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																																				Terlaksananya monev-pelaksanaan usulan pokir DPRD	Jumlah laporan monev-pelaksanaan pokir DPRD	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																																				Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kematis	Ketua Tim Kerja Penyusunan Pendanaan APBD	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pemrocanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kemanfaatan Analisa Data	Persentase Ketersediaan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah analisa data dibagi jumlah data yang digunakan dalam perencanaan	Kepala Bidang PPD	100	100	100	100	100	100	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Analisa Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ketua Tim Kerja Analisa Data Pembangunan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Tersusunnya Buku Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Dievaluasi	Ketua Tim Kerja Analisa Data Pembangunan	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku
																																				Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																																				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Laporan Bulanan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Bulanan Pembangunan Daerah secara berjenjang dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90%	((Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 80% / Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian) + (Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 80% / Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian)) / 2) x 100%	Kepala Bidang Perekonomian	80	84	87	92	95	96	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian X 100%	Kepala Bidang Perekonomian	100	100	100	100	100	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang perekonomian	Ketua Tim Kerja Ekonomi dan Kesangan Daerah, Ketua Tim Kerja Pariwisata dan Kebudayaan, Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Data Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Bidang Perekonomian yang disusun	Ketua Tim Kerja Ekonomi dan Kesangan Daerah, Ketua Tim Kerja Pariwisata dan Kebudayaan, Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang perekonomian yang disusun	Ketua Tim Kerja Ekonomi dan Kesangan Daerah, Ketua Tim Kerja Pariwisata dan Kebudayaan, Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kebudayaan	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Ekonomi dan Kesangan Daerah yang dimonev	Ketua Tim Kerja Ekonomi dan Kesangan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pariwisata dan Kebudayaan yang dimonev	Ketua Tim Kerja Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra sektor Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pengembangan Dunia Usaha yang dimonev	Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Mitra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pendampingan perencanaan mitra perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat, Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat, Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pemerintahan yang dimonev	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Kesejahteraan Rakyat yang dimonev	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Manusia yang dimonev	Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah

CASCADING RAPPEDA TAHUN 2025-2029

No.	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggung	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggung	Target					Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penganggung	Target				
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Tujuan Ke-1 dst dari Tujuan yang terdapat pada Renstra Perangkat Daerah yang akan dicascadingkan	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Tujuan/ Outcome pada Poksa Kinerja OPD	Tuliskan cara mengukur indikator sasaran	2026	2026	2027	2028	2029	Tulis Sasaran Strategis /Tujuan/ Outcome pada Poksa Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Tujuan/ Outcome pada Poksa Kinerja OPD	Tuliskan cara mengukur indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	Tulis Nama Program yang dicascade dari Renstra OPD	Tulis Sasaran Program (Intermediate Outcome) OP pada Poksa Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program (Intermediate Outcome) OP pada Poksa Kinerja OPD	Tuliskan cara mengukur indikator sasaran	Penganggung	2025	2026	2027	2028	2029	Tulis Nama Kegiatan yang dicascade dari Renstra OPD	Tulis Sasaran Kegiatan Setiap Kegiatan pada Poksa Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Sasaran pada Poksa Kinerja OPD	Tuliskan cara mengukur indikator sasaran	Penganggung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Sub(kegiatan yang dicascade dari Renstra OPD	Tulis Sasaran Operasional Output pada Poksa Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Poksa Kinerja OPD	Penganggung	2026	2026	2027	2028	2029
																			Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90%	(((Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% / Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah) + (Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% / Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah)) / 2) X 100%	Kepala Bidang IPW	93,33	95	96,67	98,33	100	100	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah X100%	Kepala Bidang IPW	100	100	100	100	100	100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan mitra perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang disusun	Ketua Tim Kerja Perkejaan Umum dan Perhubungan, Ketua Tim Kerja Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Ketua Tim Kerja Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% dibagi jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dikali 100%	Kepala Bidang IPW	94,29	95,24	96,19	98,1	100	100																			Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun	Ketua Tim Kerja Perkejaan Umum dan Perhubungan, Ketua Tim Kerja Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Ketua Tim Kerja Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																									Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Pelayanan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan yang harus disusun X 100%	Kepala Bidang IPW	100	100	100	100	100	100	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan strategis bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun	Ketua Tim Kerja Perkejaan Umum dan Perhubungan, Ketua Tim Kerja Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Ketua Tim Kerja Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Perkerjaan Umum dan Perhubungan yang dimonev	Ketua Tim Kerja Perkejaan Umum dan Perhubungan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang dimonev	Ketua Tim Kerja Permukiman dan Pengembangan Wilayah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																																				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Jumlah Perangkat Daerah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang dimonev	Ketua Tim Kerja Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
																	PROGRAM PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Kemanfaatan Riset	Persentasi Hasil Riset yang Dimodalisasi	70% x Risetkajian Perangkat Daerah yang dilaporkan (dalam DSS + 30% x RisetKajian Bappeda yang ditindaklanjuti) dikali 100 %	Kepala Bidang Ristevdat	90	92,5	94	94	95	95	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Riset Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis	Jumlah riset yang sesuai dengan program strategis dan terpublikasi melalui DSS dibagi jumlah riset yang dihasilkan pada n-1 x 100%	Kepala Bidang Ristevdat	100	100	100	100	100	100	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang berkualitas	Jumlah Laporan penerbitan Buku Jurnal Jarlit yang disusun secara lengkap dan tepat waktu - Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Hasil Penelitian di OPD yang terkusun secara lengkap dan tepat waktu	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Penumusan Rekomendasi atas Rencana Penelapan Kebijakan Daerah dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Penumusan Rekomendasi atas Rencana Penelapan Kebijakan Daerah dan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Dilevisikan yang tersusun secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penelapan Kebijakan Daerah dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Dilevisikan yang tersusun secara lengkap dan tepat waktu	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi
																				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian Tematik melalui Jaringan Penelitian	Persentase Penelitian Tematik yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan	Jumlah proposal penelitian tematik yang sesuai dengan tema pembangunan dibagi jumlah proposal penelitian tematik yang masuk dalam tahun berangkutan dikali 100%	Kepala Bidang Ristevdat	25	35	45	55	65	75	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terwujudnya Dokumen Hasil Penelitian Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial sebanyak 1 dokumen yaitu kajian di bidang aspek sosial	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terwujudnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebanyak 6 dokumen yaitu penelitian tematik dan Jumlah Dokumen Laporan Forum OPD sebanyak 1 dokumen	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	Kepala Bidang Ristevdat	1	2	3	3	3	3	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terwujudnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebanyak 3 dokumen yaitu kajian strategis di bidang pekerjaan umum	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																																				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 2 dokumen yaitu kajian strategis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																			Meningkatnya Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris	A (69,24 - 90,00)	A (89,25 - 90,00)	A (89,26 - 90,00)	A (89,27 - 90,00)	A (89,28 - 90,00)	A (89,30 - 90,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris	A (69,24 - 90,00)	A (89,25 - 90,00)	A (89,26 - 90,00)	A (89,27 - 90,00)	A (89,28 - 90,00)	A (89,30 - 90,00)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda	Persentase kelengkapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang wajib disusun X 100%	Sekretaris	100	100	100	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Didampingi	Ketua Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																					Nilai SPIP Bappeda	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Sekretaris	Optimu m (4,00 - 5)	Optimu m (4,67 - 5)	Optimu m (4,69 - 5)	Optimu m (4,7 - 5)	Optimu m (4,71 - 5)	Optimu m (4,72 - 5)			Persentase ketersediaan data statistik sectoral Bappeda	Jumlah data statistik yang disebarluaskan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%																		

CASCADING RAPPEDA TAHUN 2025-2029

No.	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2026	2026	2027	2028	2029	2029				2026	2026	2027	2028	2029	2029						2026	2026	2027	2028	2029	2029						2026	2026	2027	2028	2029	2029						2026	2026	2027	2028	2029	2029
	Nama Perangkat Daerah	Tujuan -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan (Jika Ada) -Uraian outcome pada level diatasnya/atasan	Nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran							Nama Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran							Nama Program yang dicantol dari Sasaran PD	Nama Sasaran Program -Intervensikan Outcome/OP pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Sasaran Program -Intervensikan Outcome/OP pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran	Nama Bidang Tugas yang mengampu indikator sasaran							Nama Kegiatan yang dicantol dari Sasaran PD	Nama Sasaran Kegiatan -Intervensikan Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output -Intervensikan Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator kegiatan	Nama Bidang/Subid Yang mengampu indikator kegiatan							Nama Sub Kegiatan yang dicantol dari Kegiatan PD	Nama Sasaran Operasional (Sub) -Intervensikan Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja (Sub Output) -Intervensikan Output pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Sub/Subkoor Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	Target					
1	Nama Perangkat Daerah	Tujuan -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan (Jika Ada) -Uraian outcome pada level diatasnya/atasan	Nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran							Nama Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis -Uraian Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran							Nama Program yang dicantol dari Sasaran PD	Nama Sasaran Program -Intervensikan Outcome/OP pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Sasaran Program -Intervensikan Outcome/OP pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator sasaran	Nama Bidang Tugas yang mengampu indikator sasaran							Nama Kegiatan yang dicantol dari Kegiatan PD	Nama Sasaran Kegiatan -Intervensikan Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output -Intervensikan Output pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Tuliskan cara mengukurnya indikator kegiatan	Nama Bidang/Subid Yang mengampu indikator kegiatan							Nama Sub Kegiatan yang dicantol dari Kegiatan PD	Nama Sasaran Operasional (Sub) -Intervensikan Outcome pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Indikator Kinerja (Sub Output) -Intervensikan Output pada Poksi/Fungsi/Jabatan	Nama Sub/Subkoor Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	2026	2026	2027	2028	2029	2029

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

jl. Kenari No. 56 Yogyakarta , Kode Pos 55165

Telp. (0274) 548519 Fax. (0274) 548519

Email : bpkad@jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sampai dengan 2029 dapat tersusun.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menggambarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, serta kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak daerah. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dalam pencapaian kinerja organisasi. Rencana strategis diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini tentunya ada kekurangan, kami harapkan masukan yang bersifat koreksi positif demi penyempurnaan dokumen ini.

Yogyakarta, September 2025

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta

Raden Roro Andarini, S.E.,M.Si.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197203171997032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 5
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 6
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.2 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberan Pelayanan 13
2.3 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 13
2.4 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 14
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 17
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **28**
4.1 Uraian Program 28
4.2 Uraian Kegiatan 29
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 49
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 73
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD 76
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 77
BAB V PENUTUP **78**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Sarana dan Prasarana..... 7
Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja.....8
Tabel 2. 3 Sasaran Indikator Pada.....10
Tabel 2. 4 Pencapaian target pendapatan asli daerah tahun 2024.....11
Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah.....13
Tabel 3. 1 Visi dan Misi.....14
Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....15
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta.....25
Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra.....41
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD.....66
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bagan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta..... 5
Gambar 2. 2 Komposisi Jumlah Pegawai.....6
Gambar 2. 3 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman pembangunan jangka menengah (lima tahunan) untuk mencapai tujuan, sasaran, program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra juga dapat menjadi tolok ukur yang obyektif terhadap kinerja Perangkat Daerah, sekaligus integrator utama bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara sistematis melalui tahapan awal yang terukur, yaitu kajian mengenai kondisi internal dan eksternal organisasi yang memiliki pengaruh strategis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tahapan selanjutnya adalah perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi Perangkat Daerah yang akan dijalankan dalam kurun waktu lima tahun. Tahapan ini kemudian diikuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, lengkap dengan indikator kinerja dan target terukur. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan koordinasi antar unit kerja dan para pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi dan akuntabilitas dokumen strategis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya akan memfokuskan penyusunan Renstra terhadap pemantapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, aset dan pajak daerah. Renstra BPKAD Kota Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan relevansi terhadap berbagai isu strategis (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) di tengah masyarakat dan berbagai tantangan yang muncul dari perubahan kebijakan, perkembangan teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya. Renstra BPKAD Kota Yogyakarta disusun sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas organisasi maupun dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di dalamnya.

Adapun, Renstra BPKAD akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa program kerja utama, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta berpedoman pada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3) Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta adalah merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam pemantapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, aset dan pajak daerah. Renstra juga dirancang sebagai dasar penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja, pengukuran capaian target kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja dan evaluasi.

Adapun, tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1) Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2) Menetapkan tujuan, arah, strategi dan kebijakan BPKAD Kota Yogyakarta selama periode tahun 2025-2029;
3) Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja strategis selama periode tahun 2025-2029;
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, aset, dan pajak;
5) Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan hadir sebagai tolok ukur pelaporan dan evaluasi.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan , dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dukungan BUMD, kerjasama yang dilakukan BPKAD dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan menyajikan kelompok sasaran layanan BPKAD

Disamping itu pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2020-2025.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan. BPKAD Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan Daerah;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPKAD;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bagan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

1). Kepala Badan

2). Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

3). Kelompok Jabatan Fungsional
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
c. Kelompok Jabatan Fungsional

4). Bidang Perbendaharaan
a. Sub Bidang Kas Daerah
b. Sub Bidang Belanja Daerah
c. Kelompok Jabatan Fungsional

5). Bidang Pengelolaan Aset Daerah
a. Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah
c. Kelompok Jabatan Fungsional

6). Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah
a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
b. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah
c. Kelompok Jabatan Fungsional

7). Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan
a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
c. Kelompok Jabatan Fungsional

8). Bidang Akuntansi dan Pelaporan
a. Sub Bidang Akuntansi
b. Sub Bidang Pelaporan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk menjalankan ketugasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 131 orang. Berikut disajikan komposisi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan/pangkat.

Tabel 2. 1 Komposisi Jumlah Pegawai

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Sekretaris	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	6 orang
Kepala Subbag/Subbid.	Pembina Penata Tingkat I	IV/a III/d	4 orang 9 orang
Jabatan Fungsional Tertentu	Ahli Madya/Pembina Analis Kebijakan Ahli Muda Perencana Ahli Muda Pelaksana/Pengatur Tingkat I	IV/b IV/a III/d II/d	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jabatan Fungsional Umum	Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur	III/d III/c III/b III/a II/d II/c	9 orang 9 orang 25 orang 17 orang 2 orang 37 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Yogyakarta, 2025

Komposisi pegawai BPKAD Kota Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat digambarkan melalui tabel:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Master/S2	19 orang
Sarjana/S1	44 orang
Diploma IV/D4	1 orang
Diploma III/D3	46 orang
SLTA/sederajat	14 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Yogyakarta, 2025

Sedangkan, kondisi sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengeolaan keuangan, aset dan pajak daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi
Kendaraan roda empat	10	buah	Baik
Kendaraan roda dua	48	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	6	buah	Baik
PC Unit	90	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	75	buah	Baik
Printer	140	buah	Baik
Laptop	12	buah	Baik
LCD Proyektor	12	buah	Baik
Komputer	44	buah	Baik
Telepon	14	buah	Baik
Mesin Fax	1	buah	Baik
Rak Besi	34	buah	Baik
Rak Kayu	29	buah	Baik
Kamera Foto Digital	8	buah	Baik
Wireless Mic	3	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik

Meja Rapat	76	buah	Baik
Meja Tulis	16	buah	Baik
Meja ½ biro	160	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	9	buah	Baik
Meja Ketik	23	buah	Baik
Kursi Putar	74	buah	Baik
Kursi Besi	45	buah	Baik
Kursi Kayu	37	buah	Baik
Kursi Lipat	210	buah	Baik
Almari Besi	6	buah	Baik
Almari Kayu	2	buah	Baik
Almari Kaca	9	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Yogyakarta, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta diukur berdasarkan sasaran Perangkat Daerah, yaitu:

1) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2) meningkatnya pendapatan asli daerah
3) meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tercapainya sasaran kinerja pada masing-masing sasaran tersebut diukur dengan mempergunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitung-an
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dihitung dari: -Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah -Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	25 % Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah + 25 % Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah + 25 % Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah + 25 %

			-Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah -Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase Pendapatan Asli Daerah dihitung dari Pendapatan Asli Daerah Non Tunggakan, Bunga, dan Denda, terdiri dari: -Hasil Pajak Daerah, -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, -Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Non Denda, Bunga dan Pengembalian)	Nilai Pendapatan Asli Daerah dibagi target Pendapatan Asli Daerah di tahun n dikali 100
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BPKAD	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30)

Sumber: Metadata BPKAD Kota Yogyakarta, Tahun 2025

Berdasarkan kondisi pada akhir tahun 2024, Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Yogyakarta telah mencapai angka 97,66. Persentase PAD pada tahun ini juga telah mencapai di atas 100% yaitu 119,28%. Sedangkan, nilai Reformasi Birokrasi BPKAD Kota Yogyakarta di akhir tahun 2024 telah mencapai angka 88,32 (predikat A). Kondisi ini bahwa kebijakan strategis dan perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mempertahankan konsistensi tren positif dan bahkan meningkatkan kinerja.

Faktor pendorong

1. Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak.
2. Sosialisasi Wajib Pajak (WP) sudah dilakukan 22 sesi (sudah 85%).
3. Dilaksanakannya penagihan aktif
4. dilaksanakan sosialisasi penyusunan alokasi anggaran kepada PEP.
5. Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan.
6. Percepatan realisasi penyerapan APBD harus dilaksanakan sesuai tatakala.

Faktor penghambat :

1. Banyak wajib pajak yang sudah tutup/ objek tidak ditemukan.
2. Hotel sudah ganti manajemen, manajemen saat ini tidak mau ditagih atau manajemen yang lama

Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2024 adalah:

A. Pengembangan aplikasi di tahun 2024 antara lain :

1. Pendaftaran wajib pajak baru secara online

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pemohon melakukan pendaftaran NPWPD dengan mengakses aplikasi e-SPTPD dengan alamat https://sptpd.jogjakota.go.id. Selanjutnya setelah permohonan selesai diproses, Wajib Pajak dapat mengunduh secara mandiri dokumen e-NPWPD dan e-SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

2. Permohonan layanan Pajak Daerah secara online

Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan Pajak Daerah yang dimohonkan. Sistem e-Layanan Pajak Daerah meliputi fasilitas Permohonan angsuran, pembatalan, restitusi, keringanan Pajak Daerah, dan Penundaan Pembayaran Pajak.

3. Permohonan pelaporan dan pembayaran Pajak Reklame secara online

Pengembangan aplikasi e-SPTPD Pajak Reklame ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Reklame.

4. Layanan PBB-P2 secara online

   Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan PBB-P2 yang dimohonkan.

   Sistem e-Layanan PBB-P2 meliputi permohonan salinan SPPT, pengurangan pajak, SK-NJOP, restitusi, keberatan NJOP, realisasi dan tunggakan wajib pajak PBB-P2, bebas denda keterlambatan pembayaran, dan penundaan pembayaran PBB-P2.

5. Sewa Aset

   Dalam rangka percepatan pelayanan sewa asset, pemerintah kota Yogyakarta telah membangun aplikasi sewa asset, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan sewa dengan mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Pembayaran dilakukan secara non tunai untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sim Sewa Aset dapat diakses pada laman sewa.jogjakota.go.id.

6. e_Lelang

   Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemindahtanganan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta membangun aplikasi *e-lelang*. *E-lelang* ini merupakan aplikasi yang memberikan pengumuman adanya kegiatan penjualan barang-barang rusak kepada publik, dan memberikan kesempatan kepada semua orang secara adil untuk dapat mengikuti kegiatan lelang penjualan barang-barang rusak tersebut. Setiap orang berkesempatan mengikuti dan mendaftar dan berkompetisi untuk membeli paket penjualan barang-barang rusak tersebut. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan:

   a. Kinerja pemindahtanganan menjadi lebih cepat;

   b. Transparan; dan

   c. Akuntabel.

   E-lelang dapat di akses melalui website :

   https://lelangaset.jogjakota.go.id

B. Kolaborasi lintas sektor

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BPKAD melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Pada program pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran, BPKAD melibatkan SKPD lain diantaranya BAPPEDA dan Adminbang sebagai Tim Eksaminasi RKA, Tim Verifikasi DPA, Tim Penyusun Standar Harga Jasa, Tim Penyusun Standar Harga Barang.

Selain itu BPKAD juga melibatkan instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
   Dalam hal host to host data BPHTB dengan data pertanahan dengan tujuan untuk pertukaran data dan informasi, meningkatkan kualitas layanan dan memastikan BPHTB telah lunas dibayarkan sebelum proses balik nama sertifikat.
2. Bank BPD DIY, Bank Jogja, Bank Mandiri, Bank BNI, PT POS Indonesia dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Daerah
3. Bank BPD DIY, dalam hal pemasangan alat monitoring dan pelaporan Pajak Daerah secara online.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dalam hal gelar data Wajib Pajak untuk pertukaran informasi.
5. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal membantu penagihan tunggakan Pajak Daerah dengan Surat Kuasa Khusus.
6. Ikatan Notaris Indosia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB.
7. Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia
   Dalam penyusunan kajian efektifitas dan efisiensi pemasangan alat perekam data transaksi usaha di kota Yogyakarta.

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Sasaran Pada BPKAD Kota Yogyakarta

No	Tujuan PD	Sasaran	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah (Tahun 2020-2022)	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	93,36	93,09	95,07	-	-
2		Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	-	598,121,885,338	725,577,542,998	-	-
3	1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan daerah 2) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (Tahun 2023-2024)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	96,77	98,88
4		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	80367327 7479,53	84286562 059,51
5		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	A	A

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Layanan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta pada kelompok sasaran adalah 51 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Dinas, Badan, Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Kemantren. Sasaran pelayanan untuk semua OPD berupa dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan APBD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan dokumen perencanaan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, laporan barang milik daerah.

Disamping itu juga sasaran pelayanan BPKAD adalah melayani masyarakat sebagai wajib pajak.

2.2 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberan Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan ada beberapa perangkat daerah sesuai dengan *cross cutting* BPKAD dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yaitu :

a. Satuan Polisi Pamong Praja
   Dukungan dalam penegakan Perda Pajak dan penagihan pajak
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dukungan dalam Proses Perjanjian Usaha
c. Samsat DIY
   Sebagai pelaksana pemungutan dan penerimaaan, administrasi, distribusi hasil, pelayanan, serta pengawasan agar pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dapat optimal.

2.3 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja perangkat daerah juga didukung oleh BUMD. Dukungan BUMD ini antara lain berupa layanan sebagai Rekening Kas Umum Daerah yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penyediaan fasilitas sarana pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak, penyediaan fasilitas berupa alat monitoring pembayaran pajak, dan fasilitas dalam rangka mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Dukungan BUMD dalam pencapaian target pendapatan asli daerah tahun 2024 sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah yang Dipisahkan berupa setoran Bagian Laba ke Pemerintah Kota Yogyakarta (Dividen).

Untuk tahun 2024 realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp33.504.121.411,63 dengan jumlah penyertaan modal sebesar Rp396.286.274.979,38. Penyertaan modal tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada 4 (empat) BUMD di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu: PT. Bank BPD DIY, PT. Bank Jogja, PDAM Tirtamarta, dan PT. Jogjatama Vishesha.

Besaran bagian laba yang disetor ke Pemerintah Kota Yogyakarta tergantung pada perolehan laba BUMD tahun sebelumnya dan prosentasi kepemilikan berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada BUMD.

Untuk tahun 2024, tidak ada setoran bagian laba dari PT. Jogjatama Vishesha karena sampai dengan tahun 2024 PT. Jogjatama Vishesha masih mengalami kerugian.

Rincian realisasi penyertaan modal dan dividen masing-masing BUMD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian target pendapatan asli daerah tahun 2024

No	BUMD	Penyertaan Modal	Dividen
1	PT. Bank BPD DIY	64.967.000.000	27.990.464.906
2	PT. Bank Jogja	154.540.000.000	2.215.441.491
3	PDAM Tirtamarta	52.397.922.979,38	3.298.215.014,63
4	PT. Jogjatama Vishesha	124.381.352.000	0
Jumlah		396.286.274.979,38	33.504.121.411,63

2.4 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah di BPKAD antara lain kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak. PT POS Indonesia dalam rangka pengiriman surat kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal pajak dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati dalam rangka penerimaan pembayaran pajak daerah Kota Yogyakarta secara online system , Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Yogyakarta, PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dalam rangka pemungutan dan penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Program Ketenagalistrikan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan

BPKAD Kota Yogyakarta merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan belum optimal
   Masih ada temuan BPK terkait penyajian aset, piutang, belanja, dan kewajiban.
2. Pengelolaan aset daerah belum tertib
   Inventarisasi aset belum lengkap, pencatatan tidak sesuai kondisi riil.
3. Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Yang Kurang Optimal

Tata kelola Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan masih kurang optimal.

4. Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal
   Sistem informasi keuangan aset dan pendapatan belum terintegrasi
5. Menurunnya pendapatan transfer ke daerah
   Adanya penambahan Kementerian/Kelembagaan, realokasi prioritas pembangunan nasional, adanya utang luar negeri yang jatuh tempo sehingga berimbas pada menurunnya Transfer Ke Daerah (TKD).

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting, permasalahan pokok, serta memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dapat disimpulkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penyelesaian permasalahan aset yang belum memiliki kejelasan status hukum serta penertiban aset yang belum tercatat dalam sistem.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan, aset, dan pendapatan, sehingga mampu mengimbangi dinamika regulasi dan perkembangan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan melalui skema sewa, kerjasama pemanfaatan, atau bentuk lain yang sesuai regulasi, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital, untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta memperkuat pengawasan internal maupun eksternal.
6. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi (peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi) serta ekstensifikasi (penggalian potensi sumber pendapatan baru) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan BPKAD Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam tabel, berikut ini:

Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan	1. Kualitas laporan keuangan belum optimal	Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Mendorong prinsip keberlanjutan dan ketahanan fiskal	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	1. Implikasi bu filosofi sebagai warisan dunia 2. Implementasi 3. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis di Kota Yogyakarta	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	2. Pengelolaan aset daerah belum tertib					2 Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),
	3. Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Yang Kurang Optimal					3 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, aset, dan pendapatan
	4. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal					4 Mengembangkan sistem informasi keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang terintegrasi,
	5. Menurunnya pendapatan transfer ke daerah					5 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan 6 Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi (peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi) serta ekstensifikasi 7 Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Visi dan Misi

VISI	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
MISI 1	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
MISI 3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
MISI 4	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
MISI 5	Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah, dan Meningkatnya pendapatan asli daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan asli daerah		- Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,61	91,57	91,87	92,14	92,14	92,14	92,42	
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	842.865.622.059,51	1.000.000.000.000	964.000.000.000	1.013.000.000.000	1.066.000.000.000	1.123.000.000.000	1.123.000.000.000	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi BPKAD (Nilai)	A (88,32)	A (88,32-88,35)	A (88,33-88,36)	A (88,34-88,37)	A (88,35-88,38)	A (88,36-88,39)	A (88,37-88,40)	

Tujuan jangka menengah BPKAD secara umum adalah “Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan asli daerah”. Tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dengan indikator sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sasaran Meningkatnya

pendapatan asli daerah dengan Indikator sasaran yang digunakan adalah Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Kondisi awal di tahun 2025 dari Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 92,61%. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2029 adalah sebesar 92,14%. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan, sehingga indikator mencapai 92,14% di tahun terakhir Renstra.

Kondisi awal di tahun 2025 dari Nilai Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp842.865.622.059,51. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2029 adalah sebesar Rp1.123.000.000.000,-. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan, sehingga indikator mencapai Rp1.123.000.000.000,- di tahun terakhir Renstra.

Kondisi awal di tahun 2025 dari Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BPKAD adalah A (88,32). Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2029 adalah Nilai RB A (88,37-88,40). Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan, sehingga indikator mencapai Nilai RB A (88,37-88,40) di tahun terakhir Renstra.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja BPKAD yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

A. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
   a. Tersusunnya Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
   b. Tersusunnya Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD.
   c. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
   d. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   e. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   f. Tersusunnya regulasi dan kebijakan anggaran.
2. Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   a. Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah
   b. Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan daerah
   c. Terlaksananya Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan SKPD terkait.
   d. Tersusunnya Anggaran Kas Pemerintah Daerah
   e. Tersusunnya pedoman teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawaban sub kegiatan
   f. Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan daerah
3. Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
   a. Tersusunnya laporan keuangan SKPD
   b. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
   c. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
   d. Terlaksananya pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
   e. Terlaksananya pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah.
   f. Terlaksananya sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

   Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   a. Terlaksananya optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik daerah
   b. Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah
   c. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah

d. Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah
e. Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
f. Tersedianya Standar Harga Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
g. Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah
h. Tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

a. Tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah
b. Tersedianya hasil analisa pengembangan pajak daerah
c. Tersusunnya kebijakan pajak daerah
d. Terlaksanakannya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
e. Tersedianya layanan konsultasi pajak daerah
f. Tersedianya Data Obyek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.
g. Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak
h. Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah
i. Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
j. Terlaksananya penagihan, penyelesaian keberatan pajak daerah
k. Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

C. Meningkatnya Reformasi Birokrasi BPKAD

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
e. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
f. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
g. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
h. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
i. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

j. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
k. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
l. Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.
m. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
n. Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
o. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
p. Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
q. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
r. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
s. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD
t. Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD
u. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
v. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
w. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
x. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
y. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.
z. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
aa. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
bb. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
cc. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
dd. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
ee. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
ff. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
gg. Tersedianya dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
hh. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
ii. Terlaksananya pengadaan mebel
jj. Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
kk. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
ll. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
mm. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025-2029. Adapun, penahapan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengedepankan stabilitas SDM dan penguatan dasar akuntabilitas SDM di bidang perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah melalui: pelatihan, sosialisasi dan pendampingan aktif di PD, atau melalui Jogja Corpu.	Akselerasi pencatatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih terpadu, yaitu melalui Cloud Based System.	Meminimalisir hasil temuan adit yang signifikan atau berulang melalui pelaporan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu dan memenuhi tingkat kepatuhan keterpaduan data yang tinggi.	Peningkatan berkelanjutan/ upgrade Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk optimalisasi otoriasi, pelaporan dan transparansi.	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas keuangan dan aset daerah.
Penguatan perancangan program intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Akselerasi digitalisasi dan modernisasi layanan pajak dan retribusi melalui *fintech collaboration* yang relevan	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemungutan PAD	Ekspansi sumber PAD melalui studi kelayakan atau Kerjasama dengan pihak ketiga	Konsolidasi dan evaluasi PAD melalui rencana penyempurnaan kebijakan
Internalisasi dan Penguatan Impelementasi Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan *good governance*	Peningkatan pengendalian internal yang berbasis manajemen risiko dan audit rutin	Evaluasi dan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan profesionalisme dan standa kerja, transparansi serta integrasi	Konsolidasi Budaya Organisasi dengan sistem *reward and punishment* yang transparan dan memotivasi	Monitoring dan evaluasi peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Penahapan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun ini juga sangat bergantung dengan kolaborasi lintas sektor (*cross cutting*) dengan beberapa Perangkat Daerah lainnya di Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja
   Dukungan dalam penegakan Perda Pajak dan penagihan pajak
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dukungan dalam Proses Perjanjian Usaha
c. Samsat DIY
   Sebagai pelaksana pemungutan dan penerimaaan, administrasi, distribusi hasil, pelayanan, serta pengawasan agar pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dapat optimal.

Arah dan kebijakan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas

dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kota Yogyakarta. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.3 dibawah ini:

strategi dan penahapan pembangunan

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPKAD Kota Yogyakarta

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah	- Mengedepankan stabilitas SDM dan penguatan dasar akuntabilitas SDM di bidang perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah melalui: pelatihan, sosialisasi dan pendampingan aktif di PD, atau melalui Jogja Corpu - Akselerasi pencatatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih terpadu, yaitu melalui Cloud Based System - Meminimalisir hasil temuan adit yang signifikan atau berulang melalui pelaporan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu dan memenuhi tingkat kepatuhan keterpaduan data yang tinggi. - Peningkatan berkelanjutan/upgrade Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk optimalisasi otoriasi, pelaporan dan transparansi. - Monitoring dan evaluasi akuntabilitas keuangan dan aset daerah.	
		Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	- Mengedepankan stabilitas SDM dan penguatan dasar akuntabilitas SDM di bidang perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah melalui: pelatihan, sosialisasi dan pendampingan aktif di PD, atau melalui Jogja Corpu - Akselerasi pencatatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih terpadu, yaitu melalui Cloud Based System	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Meminimalisir hasil temuan adit yang signifikan atau berulang melalui pelaporan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu dan memenuhi tingkat kepatuhan keterpaduan data yang tinggi. - Peningkatan berkelanjutan/upgrade Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk optimalisasi otoriasi, pelaporan dan transparansi. - Monitoring dan evaluasi akuntabilitas keuangan dan aset daerah.	
		Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	- Mengedepankan stabilitas SDM dan penguatan dasar akuntabilitas SDM di bidang perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah melalui: pelatihan, sosialisasi dan pendampingan aktif di PD, atau melalui Jogja Corpu - Akselerasi pencatatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih terpadu, yaitu melalui Cloud Based System - Meminimalisir hasil temuan adit yang signifikan atau berulang melalui pelaporan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu dan memenuhi tingkat kepatuhan keterpaduan data yang tinggi. - Peningkatan berkelanjutan/upgrade Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk optimalisasi otoriasi, pelaporan dan transparansi. - Monitoring dan evaluasi akuntabilitas keuangan dan aset daerah.	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	- Mengedepankan stabilitas SDM dan penguatan dasar akuntabilitas SDM di bidang perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah melalui: pelatihan, sosialisasi dan pendampingan aktif di PD, atau melalui Jogja Corpu	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Akselerasi pencatatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih terpadu, yaitu melalui Cloud Based System - Meminimalisir hasil temuan adit yang signifikan atau berulang melalui pelaporan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu dan memenuhi tingkat kepatuhan keterpaduan data yang tinggi. - Peningkatan berkelanjutan/upgrade Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk optimalisasi otoriasi, pelaporan dan transparansi. - Monitoring dan evaluasi akuntabilitas keuangan dan aset daerah.	
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah melalui	- Penguatan perancangan program intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemungutan PAD - Konsolidasi dan evaluasi PAD melalui rencana penyempurnaan kebijakan	
		Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD dan penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	- Penguatan perancangan program intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Akselerasi digitalisasi dan modernisasi layanan pajak dan retribusi melalui *fintech collaboration* yang relevan - Ekspansi sumber PAD melalui studi kelayakan atau Kerjasama dengan pihak ketiga	
3	Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif	Mewujudkan kepatuhan perangkat daerah terhadap saran dan rekomendasi Pemeriksaan	- Peningkatan pengendalian internal yang berbasis manajemen risiko dan audit rutin	
		Meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	- Evaluasi dan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan profesionalisme dan standa kerja, transparansi serta integrasi	
		Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah	- Peningkatan pengendalian internal yang berbasis	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			manajemen risiko dan audit rutin - Monitoring dan evaluasi peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	
		Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi dan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan profesionalisme dan standa kerja, transparansi serta integrasi - Monitoring dan evaluasi peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	
		Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah	- Monitoring dan evaluasi peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	
		Meningkatkan responsivitas perangkat daerah	- Internalisasi dan Penguatan Impelementasi Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan *good governance*	
		Meningkatkan manajemen risiko dan pencegahan korupsi perangkat daerah	- Peningkatan pengendalian internal yang berbasis manajemen risiko dan audit rutin	
		Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisien, efektif) di komponen aktivitas serta kualitas pengawasan	- Konsolidasi Budaya Organisasi dengan sistem *reward and punishment* yang transparan dan memotivasi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja perangkat daerah adalah tingkat pencapaian hasil atau prestasi kerja yang diperoleh oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

Dengan kata lain, kinerja perangkat daerah menggambarkan seberapa efek if, efisien, dan akuntabel suatu perangkat daerah dalam mengelola mengelola sumber daya (anggaran, aparatur, sarana prasarana), menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4.1 Uraian Program

Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD melaksanakan program - program berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat supporting atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan yang diampu oleh sekretariat yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatur, mengurus, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, efektif, serta akuntabel. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

   Program pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, kegiatan Koordinasi

dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan, Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan, mengamankan, memelihara, menilai, menginventarisasi, dan menghapuskan serta mempertanggungjawabkan seluruh aset atau barang milik daerah secara tertib, efisien, efektif, optimal, akuntabel, dan transparan. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan yang menjadi hak daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kehiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oeh 2 bidang yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, dan Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

   1. Perencanaan dan Penetapan Target Pendapatan
      → Menyusun proyeksi dan target pendapatan daerah dalam dokumen APBD.
   2. Pemungutan dan Penerimaan Pendapatan
      → Melaksanakan penagihan, pemungutan, dan pencatatan penerimaan sesuai peraturan (misal pajak, retribusi, dll).
   3. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan
      → Pengawasan dan pelaporan atas capaian realisasi dibandingkan dengan target.
   4. Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait
      → Terutama antara Bappeda, BPKAD, dan OPD penghasil.
   5. Inovasi dan Digitalisasi Sistem Pemungutan
      → Pengembangan sistem pembayaran online, integrasi data, dan aplikasi layanan publik.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program kerja BPKAD Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Peningkatan akuntabilitas keuangan dan Aset daerah dan Peningkatan pendapatan asli daerah. Setiap kegiatan merupakan langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis BPKAD Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Yogyakarta antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
   Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

   Terdiri dari 9 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

    Terdiri dari 11 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

11. Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

    Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

    Terdiri dari 11 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

13. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

    Terdiri dari 14 Sub Kegiatan yaitu Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Predikat)		
					Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)		
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah			Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah		Persentase penyerapan belanja daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah		Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah		Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah		Persentase realisasi pendapatan dana transfer (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah	Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan dokumen penganggaran perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen penganggaran secara tepat waktu	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Meningkatnya penyerapan belanja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan serapan belanja >90% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketepatan waktu penyaluran dana transfer	Persentase dana transfer yang disalurkan tepat waktu	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan laporan keuangan secara tepat waktu	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan laporan keuangan secara tepat waktu	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBD	Persentase ketepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBD	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) (Nilai)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori baik	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Nilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Nilai pendapatan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pendapatan asli daerah			Nilai PAD (Rp)		
			Meningkatnya pengembangan PAD		Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah		Persentase realisasi pajak daerah (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan		Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Menurunnya piutang pajak daerah	Nilai piutang pajak daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya pengembangan PAD	Meningkatnya ketercapaian target pendapatan Perangkat Daerah	Persentase capaian target pendapatan Perangkat Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya pengembangan PAD	Meningkatnya ketercapaian target pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan	Menurunnya piutang pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah	Meningkatnya pelayanan pajak daerah sesuai SOP	Persentase pelayanan pajak daerah sesuai SOP	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan	Menurunnya piutang pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Meningkatnya pengembangan PAD	Meningkatnya ketercapaian target pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah	Meningkatnya pendaftaran Objek Pajak	Persentase objek pajak yang didaftarkan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Meningkatnya penerbitan ketetapan pajak daerah	Persentase penerbitan ketetapan pajak daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif			Nilai reformasi birokrasi BPKAD (Predikat)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPKAD		Nilai SAKIP BPKAD (Predikat)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP BPKAD (Predikat)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM BPKAD (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sectoral	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BPKAD	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPKAD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPKAD	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

‘	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
5.02 - KEUANGAN						92.922.761.707		94.812.767.745,97		97.216.372.142,6		99.859.382.910,47		103.298.211.426,21	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						64.787.066.266		66.104.792.259		67.782.654.876		69.625.370.063		72.022.947.513	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPKAD						0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Nilai SAKIP BPKAD (Predikat)	A	A		A		A		A		A		A		
	Nilai SPIP BPKAD (Predikat)	Skala 4	Skala 4		Skala 4		Skala 4		Skala 4		Skala 4		Skala 4		
	Nilai IKM BPKAD (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.630.000,00		3.630.000		3.703.834,2		3.797.837,54		3.901.100,72		4.035.454,61	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.630.000	1	3.630.000	1	3.703.834,2	1	3.797.837,54	1	3.901.100,72	1	4.035.454,61	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				990.000		990.000		1.010.136,6		1.035.773,87		1.063.936,56		1.100.578,53	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	990.000	3	990.000	3	1.010.136,6	3	1.035.773,87	3	1.063.936,56	3	1.100.578,53	
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	330.000	2	330.000	2	336.712,2	2	345.257,96	2	354.645,52	2	366.859,51	
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	330.000	2	330.000	2	336.712,2	2	345.257,96	2	354.645,52	2	366.859,51	
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	330.000	2	330.000	2	336.712,2	2	345.257,96	2	354.645,52	2	366.859,51	
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	330.000	2	330.000	2	336.712,2	2	345.257,96	2	354.645,52	2	366.859,51	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				990.000		990.000		1.010.136,6		1.035.773,87		1.063.936,56		1.100.578,53	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	990.000	4	990.000	4	1.010.136,6	4	1.035.773,87	4	1.063.936,56	4	1.100.578,53	
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				55.206.753.516		55.206.753.516		56.329.658.882,52		57.759.305.624,96		59.329.781.144,9		61.373.098.807,54	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1,00	165.000	1	55.206.753.516	1	56.329.658.882,52	1	57.759.305.624,96	1	59.329.781.144,9	1	61.373.098.807,54	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1,00	330.000	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1,00	165.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1,00	1.980.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1,00	165.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	17,00	660.000	17		17		17		17		17		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	165	165,00	55.203.288.516	165		165		165		165		165		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				55.203.288.516		55.203.288.516		56.326.123.404,42		57.755.680.416,42		59.326.057.366,94		61.369.246.782,66	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	165	165	55.203.288.516	165	55.203.288.516	165	56.326.123.404,42	165	57.755.680.416,42	165	59.326.057.366,94	165	61.369.246.782,66	
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.980.000		1.980.000		2.020.273,2		2.071.547,73		2.127.873,12		2.201.157,07	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.980.000	1	1.980.000	1	2.020.273,2	1	2.071.547,73	1	2.127.873,12	1	2.201.157,07	
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				165.000		165.000		168.356,1		172.628,98		177.322,76		183.429,76	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	165.000	1	165.000	1	168.356,1	1	172.628,98	1	177.322,76	1	183.429,76	
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						165.000		168.356,1		172.628,98		177.322,76		183.429,76	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	165.000	1	165.000	1	168.356,1	1	172.628,98	1	177.322,76	1	183.429,76	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						660.000		673.424,4		690.515,91		709.291,04		733.719,02	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	17	660.000	17	660.000	17	673.424,4	17	690.515,91	17	709.291,04	17	733.719,02	
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						165.000		168.356,1		172.628,98		177.322,76		183.429,76	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		165.000	1	165.000	1	168.356,1	1	172.628,98	1	177.322,76	1	183.429,76	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang MDaerah pada Perangkat Daerah				1.320.000,00		1.320.000		1.346.848,8		1.381.031,84		1.418.582,08		1.467.438,04	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	330.000	1	1.320.000	1	1.346.848,8	1	1.381.031,84	1	1.418.582,08	1	1.467.438,04	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	330.000	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				330.000		330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.980.000,00		1.980.000		1.977.338,34		2.150.512,62		1.913.786,01		1.659.401,86	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BPKAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	660.000	3	1.980.000	3	1.977.338,34	3	2.150.512,62	3	1.913.786,01	3	1.659.401,86	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	1.320.000	3		3		3		3		3		
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				660.000		660.000		673.424,4		690.515,91		709.291,04		733.719,02	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	660.000	3	660.000	3	673.424,4	3	690.515,91	3	709.291,04	3	733.719,02	
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.320.000		1.320.000		1.303.913,94		1.459.996,71		1.204.494,97		925.682,84	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	1.320.000	3	1.320.000	3	1.303.913,94	3	1.459.996,71	3	1.204.494,97	3	925.682,84	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				795.862.000,00		795.862.000		812.049.833,08		832.659.657,85		855.299.673,95		884.756.194,7	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	660.000	2	795.862.000	2	812.049.833,08	2	832.659.657,85	2	855.299.673,95	2	884.756.194,7	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	45.848.900	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	297.007.100	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.375.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	256.350.000	6		6		6		6		6		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	180.291.000	2		2		2		2		2		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.375.000		15.375.000		15.687.727,5		16.085.882,02		16.523.257,16		17.092.318,13	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.375.000	1	15.375.000	1	15.687.727,5	1	16.085.882,02	1	16.523.257,16	1	17.092.318,13	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				297.007.100		297.007.100		303.048.224,41		310.739.588,35		319.188.597,76		330.181.453,06	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	297.007.100	3	297.007.100	3	303.048.224,41	3	310.739.588,35	3	319.188.597,76	3	330.181.453,06	
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.848.900		45.848.900		46.781.466,63		47.968.780,25		49.273.051,38		50.970.015,27	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	45.848.900	1	45.848.900	1	46.781.466,63	1	47.968.780,25	1	49.273.051,38	1	50.970.015,27	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				256.350.000		256.350.000		261.564.159		268.202.657,36		275.495.087,61		284.983.138,43	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	256.350.000	6	256.350.000	6	261.564.159	6	268.202.657,36	6	275.495.087,61	6	284.983.138,43	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.291.000		180.291.000		183.958.118,94		188.626.976		193.755.743,48		200.428.691,28	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	180.291.000	2	180.291.000	2	183.958.118,94	2	188.626.976	2	193.755.743,48	2	200.428.691,28	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				660.000		660.000		673.424,4		690.515,91		709.291,04		733.719,02	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	660.000	2	660.000	2	673.424,4	2	690.515,91	2	709.291,04	2	733.719,02	
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						330.000		336.712,2		345.257,96		354.645,52		366.859,51	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	330.000	1	330.000	1	336.712,2	1	345.257,96	1	354.645,52	1	366.859,51	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				598.385.000,00		598.385.000		610.556.150,9		626.052.066,01		643.074.421,68		665.221.904,77	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	533.737.500	10	598.385.000	10	610.556.150,9	10	626.052.066,01	10	643.074.421,68	10	665.221.904,77	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	66	66	64.647.500	66		170		120		120		120		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				64.647.500		64.647.500		65.962.430,15		67.636.556,63		69.475.594,6		71.868.334,08	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	66	66	64.647.500	66	64.647.500	170	65.962.430,15	120	67.636.556,63	120	69.475.594,6	120	71.868.334,08	
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				533.737.500		533.737.500		544.593.720,75		558.415.509,38		573.598.827,08		593.353.570,69	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	533.737.500	10	533.737.500	10	544.593.720,75	10	558.415.509,38	10	573.598.827,08	10	593.353.570,69	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.521.669.750,00		7.521.669.750		7.674.660.512,72		7.869.443.396,52		8.083.413.562,47		8.361.806.325,57	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	195.430.000	2	7.521.669.750	2	7.674.660.512,72	2	7.869.443.396,52	2	8.083.413.562,47	2	8.361.806.325,57	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	6.857.550.000	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	468.689.750	2		2		2		2		2		
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				195.430.000		195.430.000		199.405.046,2		204.465.946,27		210.025.375,35		217.258.649,28	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	195.430.000	2	195.430.000	2	199.405.046,2	2	204.465.946,27	2	210.025.375,35	2	217.258.649,28	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.857.550.000		6.857.550.000		6.997.032.567		7.174.617.253,55		7.369.695.096,67		7.623.507.395,8	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	6.857.550.000	4	6.857.550.000	4	6.997.032.567	4	7.174.617.253,55	4	7.369.695.096,67	4	7.623.507.395,8	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						468.689.750		478.222.899,52		490.360.196,7		503.693.090,45		521.040.280,49	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	468.689.750	2	468.689.750	2	478.222.899,52	2	490.360.196,7	2	503.693.090,45	2	521.040.280,49	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				657.466.000,00		657.466.000		670.838.858,44		687.864.748,66		706.567.791,19		730.901.985,91	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55	55	113.320.000	55	657.466.000	55	670.838.858,44	55	687.864.748,66	55	706.567.791,19	55	730.901.985,91	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	500.000	3		3		3		3		3		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	68.070.000	20		20		20		20		20		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	7.960.000	10		10		10		10		10		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	64.616.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	403.000.000	2		2		2		2		2		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.616.000		64.616.000		65.930.289,44		67.603.600,19		69.441.742,08		71.833.315,67	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	64.616.000	1	64.616.000	1	65.930.289,44	1	67.603.600,19	1	69.441.742,08	1	71.833.315,67	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	64.616.000	1		1		1		1		1		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	403.000.000	2		2		2		2		2		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.616.000		64.616.000		65.930.289,44		67.603.600,19		69.441.742,08		71.833.315,67	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	64.616.000	1	64.616.000	1	65.930.289,44	1	67.603.600,19	1	69.441.742,08	1	71.833.315,67	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.320.000		113.320.000		115.624.928,8		118.559.489,49		121.783.122,01		125.977.332,73	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55	55	113.320.000	55	113.320.000	55	115.624.928,8	55	118.559.489,49	55	121.783.122,01	55	125.977.332,73	
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				7.960.000		7.960.000		8.121.906,4		8.328.040,38		8.554.479,8		8.849.096,09	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	7.960.000	10	7.960.000	10	8.121.906,4	10	8.328.040,38	10	8.554.479,8	10	8.849.096,09	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				68.070.000		68.070.000		69.454.543,8		71.217.300,12		73.153.698,51		75.673.111,89	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	68.070.000	20	68.070.000	20	69.454.543,8	20	71.217.300,12	20	73.153.698,51	20	75.673.111,89	
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				500.000		500.000		510.170		523.118,11		537.341,7		555.847,74	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	500.000	3	500.000	3	510.170	3	523.118,11	3	537.341,7	3	555.847,74	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				403.000.000		403.000.000		411.197.020		421.633.200,37		433.097.407,09		448.013.281,79	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	403.000.000	2	403.000.000	2	411.197.020	2	421.633.200,37	2	433.097.407,09	2	448.013.281,79	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				103.044.714.893,00		17.087.702.828		17.435.266.704,22		17.874.907.134,96		18.360.918.668,33		18.993.260.370,55	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya ketepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	64	65	13.068.000	65	84.295.000	65	86.009.560,3	65	88.192.482,93	65	90.590.436,55	65	93.710.371,18	
Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Persentase)	100	100	258.632.500,00	100	259.692.000	100	264.974.135,28	100	271.699.178,83	100	279.086.679,51	100	288.698.424,75	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik (Persentase)	100	92,68		92,68		92,68		95,12		95,12		97,56		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				80.147.500,00		259.692.000		264.974.135,28		271.699.178,83		279.086.679,51		288.698.424,75	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisaasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	6	6	3.583.000,00	6		6		6		6		6		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	23	23	38.760.000,00	23		23		23		23		23		
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	17	17	1.590.000,00	17		17		17		17		17		
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	23.146.500,00	2		2		2		2		2		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1.590.000,00		3.275.000		3.341.613,5		3.426.423,65		3.519.588,11		3.640.802,72	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	17	17	1.590.000,00	17	3.275.000	17	3.341.613,5	17	3.426.423,65	17	3.519.588,11	17	3.640.802,72	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				13.068.000		13.068.000		13.333.803,12		13.672.215,04		14.043.962,57		14.527.636,64	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	64	65	13.068.000	65	13.068.000	65	13.333.803,12	65	13.672.215,04	65	14.043.962,57	65	14.527.636,64	
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						28.118.000		28.689.920,12		29.418.070,29		30.217.947,62		31.258.653,74	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	23.146.500,00	2	28.118.000	2	28.689.920,12	2	29.418.070,29	2	30.217.947,62	2	31.258.653,74	
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						4.224.000		4.309.916,16		4.419.301,83		4.539.462,65		4.695.801,74	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	6	6	3.583.000,00	6	4.224.000	6	4.309.916,16	6	4.419.301,83	6	4.539.462,65	6	4.695.801,74	
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						35.610.000		36.334.307,4		37.256.472,12		38.269.475,6		39.587.476,34	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	23	23	38.760.000,00	23	35.610.000	23	36.334.307,4	23	37.256.472,12	23	38.269.475,6	23	39.587.476,34	
Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	114.194.000,00	12	175.397.000	12	178.964.574,98	12	183.506.695,9	12	188.496.242,96	12	194.988.053,57	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41	41	41.130.000,00	41		41		41		41		41		
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						113.661.000		115.972.864,74		118.916.256,05		122.149.589,05		126.356.420,9	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	114.194.000,00	12	113.661.000	12	115.972.864,74	12	118.916.256,05	12	122.149.589,05	12	126.356.420,9	
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						61.736.000		62.991.710,24		64.590.439,85		66.346.653,91		68.631.632,67	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41	41	41.130.000,00	41	61.736.000	41	62.991.710,24	41	64.590.439,85	41	66.346.653,91	41	68.631.632,67	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah						0		0		0		0		0	
	Persentase realisasi pendapatan dana transfer (Persentase)	99			99		99		99		99		99		
	Persentase penyerapan belanja daerah (%)	95,5			93		93		93		93		93		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				102.573.887.393,00		16.530.723.828		16.866.958.751,36		17.295.055.897,76		17.765.301.276,75		18.377.138.253,05	
Meningkatnya ketepatan waktu penyaluran dana transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	102.521.649.393,00	12	16.338.638.828	12	16.670.966.741,36	12	17.094.082.611,76	12	17.558.870.717,75	12	18.163.598.226,05	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	181	181	660.000,00	181		181		181		181		181		
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	1	2.190.000,00	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1	1	805.000,00	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	25	25	47.778.000,00	25		25		25		25		25		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1	805.000,00	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						16.284.444.828		16.615.670.435,8		17.037.376.151,46		17.500.622.409,02		18.103.343.844,79	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	102.521.649.393,00	12	16.284.444.828	12	16.615.670.435,8	12	17.037.376.151,46	12	17.500.622.409,02	12	18.103.343.844,79	
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						385.000		392.830,9		402.800,95		413.753,11		428.002,76	
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1	805.000,00	1	385.000	1	392.830,9	1	402.800,95	1	413.753,11	1	428.002,76	
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						660.000		673.424		697.250		716.208		740.875	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	181	181	660.000,00	181	660.000	181	673.424	181	697.250	181	716.208	181	740.875	
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah						3.080.000		3.142.647,2		3.222.407,59		3.310.024,85		3.424.022,1	
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	1	2.190.000,00	1	3.080.000	1	3.142.647,2	1	3.222.407,59	1	3.310.024,85	1	3.424.022,1	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						49.684.000		50.694.572,56		51.981.200,81		53.394.569,66		55.233.478,64	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	25	25	47.778.000,00	25	49.684.000	25	50.694.572,56	25	51.981.200,81	25	53.394.569,66	25	55.233.478,64	
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						385.000		392.830,9		402.800,95		413.753,11		428.002,76	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1	1	805.000,00	1	385.000	1	392.830,9	1	402.800,95	1	413.753,11	1	428.002,76	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penyerapan belanja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	2	2	192.085.000	2	192.085.000	2	195.992.010	2	200.973.286	2	206.430.559	2	213.540.027	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12			12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	23			23		23		23		23		23		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	51			51		51		51		51		51		
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5			5		5		5		5		5		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						2.200.000		2.244.748		2.301.720		2.364.303		2.445.730	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	2	2	3.220.000,00	2	2.200.000	2	2.244.748	2	2.301.720	2	2.364.303	2	2.445.730	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1.760.000		1.760.000		1.795.798		1.841.376		1.891.443		1.956.584	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	23	23	3.680.000,00	23	1.760.000	23	1.795.798	23	1.841.376	23	1.891.443	23	1.956.584	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						129.075.000		131.700.386		135.042.941		138.714.759		143.492.095	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12	136.995.000,00	12	129.075.000	12	131.700.386	12	135.042.941	12	138.714.759	12	143.492.095	
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						3.740.000		3.816.072		3.919.923		4.019.316		4.157.741	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5	5	4.130.000,00	5	3.740.000	5	3.816.072	5	3.919.923	5	4.019.316	5	4.157.741	
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						55.310.000		56.435.006		57.867.326		59.440.738		61.487.877	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	51	51	64.170.000,00	51	55.310.000	51	56.435.006	51	57.867.326	51	59.440.738	51	61.487.877	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah						0		0		0		0		0	
	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran (%)	100			100		100		100		100		100		
	Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				20.576.000,00		297.287.000		303.333.817,58		308.152.058,37		316.530.712,07		327.423.692,75	
Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41	41	6.005.000,00	41	115.176.000	41	117.518.679,84	41	117.620.932,76	41	120.819.045,9	41	124.980.053,84	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5	6	8.566.000,00	3		5		5		5		5		
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41	41	6.005.000,00	41		41		41		41		41		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						4.805.000		4.902.733,7		5.027.165,08		5.163.853,7		5.341.696,82	
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41	41	6.005.000,00	41	4.805.000	41	4.902.733,7	41	5.027.165,08	41	5.163.853,7	41	5.341.696,82	
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						4.805.000		4.902.733,7		5.027.165,08		5.163.853,7		5.341.696,82	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41	41	6.005.000,00	41	4.805.000	41	4.902.733,7	41	5.027.165,08	41	5.163.853,7	41	5.341.696,82	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						105.566.000		107.713.212,44		107.566.602,6		110.491.338,5		114.296.660,2	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5	6	8.566.000,00	3	105.566.000	5	107.713.212,44	5	107.566.602,6	5	110.491.338,5	5	114.296.660,2	
Meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41			43	182.111.000	43	185.815.137,74	43	190.531.125,61	43	195.711.666,17	43	202.443.638,91	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2			4		4		4		4		4		
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43			43		43		43		43		43		
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	43			5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2			2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2			2		2		2		2		2		
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						3.637.500		3.711.486,75		3.805.684,28		3.909.160,84		4.035.454,62	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	4.237.500,00	2	3.637.500	2	3.711.486,75	2	3.805.684,28	2	3.909.160,84	2	4.035.454,62	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						5.837.500		5.956.234,75		6.107.403,9		6.273.464		6.489.522,41	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	7.637.500,00	2	5.837.500	2	5.956.234,75	2	6.107.403,9	2	6.273.464	2	6.489.522,41	
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						6.600.000		6.734.244		6.905.159		7.092.910		7.337.190	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43	43	9.000.000,00	43	6.600.000	43	6.734.244	43	6.905.159	43	7.092.910	43	7.337.190	
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						6.600.000		6.734.244		6.905.159		7.092.910		7.337.190	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	41	43	9.000.000,00	43	6.600.000	43	6.734.244	43	6.905.159	43	7.092.910	43	7.337.190	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						89.913.500		91.742.340,59		94.070.761,19		96.628.545,19		99.956.432,29	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	43	5	88.239.500,00	5	89.913.500	5	91.742.340,59	5	94.070.761,19	5	96.628.545,19	5	99.956.432,29	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						69.522.500		70.936.587,65		72.736.958,24		74.714.676,14		77.287.849,59	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						69.522.500		70.936.587,65		72.736.958,24		74.714.676,14		77.287.849,59	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	4	70.667.500,00	4	69.522.500	4	70.936.587,65	4	72.736.958,24	4	74.714.676,14	4	77.287.849,59	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						8.394.714.613		8.565.463.108,23		8.782.854.561,9		9.021.660.377,47		9.332.366.360,85	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah						0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) (Nilai)	2,98	2,98		2,98		2,98		2,98		2,98		2,98		
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah						8.394.714.613		8.565.463.108,23		8.782.854.561,9		9.021.660.377,47		9.332.366.360,85	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		8.394.714.613	1	8.394.714.613	1	8.565.463.108,23	1	8.782.854.561,9	1	9.021.660.377,47	1	9.332.366.360,85	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41			41		41		41		41		41		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2			2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	12			12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	7			7		7		7		7		7		
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	3			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4			4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1			1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5			5		5		5		5		5		
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga						87.150.000		88.922.631		91.179.487,37		93.658.657,64		96.884.261,81	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	79.413.400,00	1	87.150.000	1	88.922.631	1	91.179.487,37	1	93.658.657,64	1	96.884.261,81	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						946.000		965.241,64		989.739,47		1.016.650,49		1.051.663,93	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	975.000,00	1	946.000	1	965.241,64	1	989.739,47	1	1.016.650,49	1	1.051.663,93	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						2.878.270.820		2.936.814.848,48		3.011.351.209,33		3.093.229.848,71		3.199.760.684,7	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	4.038.737.040,00	1	2.878.270.820	1	2.936.814.848,48	1	3.011.351.209,33	1	3.093.229.848,71	1	3.199.760.684,7	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.525.000		6.657.718,5		6.826.691,4		7.012.309,13		7.253.813,06	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	3	1	56.799.000,00	1	6.525.000	1	6.657.718,5	1	6.826.691,4	1	7.012.309,13	1	7.253.813,06	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah						320.990.032		327.518.969,25		335.831.400,69		344.962.656,48		356.843.170,36	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	101.678.318,00	2	320.990.032	2	327.518.969,25	2	335.831.400,69	2	344.962.656,48	2	356.843.170,36	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah						1.929.579.333		1.968.826.976,63		2.018.795.805,3		2.073.686.863,25		2.145.104.638,82	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	3.961.441.403,00	4	1.929.579.333	4	1.968.826.976,63	4	2.018.795.805,3	4	2.073.686.863,25	4	2.145.104.638,82	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah						272.000.000		277.532.480		284.576.254,34		292.313.882,7		302.381.172,82	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5	5	304.125.000,00	5	272.000.000	5	277.532.480	5	284.576.254,34	5	292.313.882,7	5	302.381.172,82	
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						134.310.000		137.041.865,4		140.519.987,94		144.340.726,42		149.311.821,03	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	89.460.000,00	1	134.310.000	1	137.041.865,4	1	140.519.987,94	1	144.340.726,42	1	149.311.821,03	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						2.656.156.900		2.710.183.131,35		2.778.967.579,22		2.854.527.707,7		2.952.837.641,95	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	7	7	2.841.081.453,00	7	2.656.156.900	7	2.710.183.131,35	7	2.778.967.579,22	7	2.854.527.707,7	7	2.952.837.641,95	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						28.896.528		29.484.283,38		30.232.594,49		31.054.618,74		32.124.139,81	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	29.712.528,00	12	28.896.528	12	29.484.283,38	12	30.232.594,49	12	31.054.618,74	12	32.124.139,81	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						79.890.000		81.514.962,6		83.583.812,35		85.856.456,21		88.813.352,56	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41	41	40.404.000,00	41	79.890.000	41	81.514.962,6	41	83.583.812,35	41	85.856.456,21	41	88.813.352,56	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2.653.278.000		2.707.245.674,52		2.775.955.569,74		2.851.433.801,67		2.949.637.181,81	
Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah						0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase realisasi pajak daerah (Persentase)	119,54			100		100		100		100		100		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.653.278.000		2.707.245.674,52		2.775.955.569,74		2.851.433.801,67		2.949.637.181,81	
Meningkatnya pelayanan pajak daerah sesuai SOP	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	41.881			41.881	447.084.000	41.881	456.177.688,56	41.881	467.755.478,3	41.881	480.473.749,75	41.881	497.021.265,69	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						447.084.000		456.177.688,56		467.755.478,3		480.473.749,75		497.021.265,69	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	41.881	41881	447.084.000,00	41.881	447.084.000	41.881	456.177.688,56	41.881	467.755.478,3	41.881	480.473.749,75	41.881	497.021.265,69	
Meningkatnya pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12			12	610.597.000	12	623.016.542,98	12	638.828.702,84	12	656.198.455,27	12	678.797.930,07	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12			12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						87.324.000		89.100.170,16		91.361.532,48		93.845.652,55		97.077.696,82	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	87.324.000	12	87.324.000	12	89.100.170,16	12	91.361.532,48	12	93.845.652,55	12	97.077.696,82	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						523.273.000		533.916.372,82		547.467.170,36		562.352.802,72		581.720.233,25	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	523.273.000	12	523.273.000	12	533.916.372,82	12	547.467.170,36	12	562.352.802,72	12	581.720.233,25	
Meningkatnya penerbitan ketetapan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	80			80	495.089.000	80	505.159.110,26	80	517.980.048,47	80	532.063.926	80	550.388.207,61	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	100.728			101.228		101.228		101.228		101.228		101.228		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	112.000			112.000		112.000		112.000		112.000		112.000		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						6.732.000		6.868.928,88		7.043.262,29		7.234.768,6		7.483.934,03	
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	80	80	7.920.000,00	80	6.732.000	80	6.868.928,88	80	7.043.262,29	80	7.234.768,6	80	7.483.934,03	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah						2.970.000		3.030.409,8		3.107.321,6		3.191.809,68		3.301.735,6	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	112.000	112000	5.060.000,00	112.000	2.970.000	112.000	3.030.409,8	112.000	3.107.321,6	112.000	3.191.809,68	112.000	3.301.735,6	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						485.387.000		495.259.771,58		507.829.464,58		521.637.347,72		539.602.537,98	
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	100.728	102253	494.177.000,00	101.228	485.387.000	101.228	495.259.771,58	101.228	507.829.464,58	101.228	521.637.347,72	101.228	539.602.537,98	
Meningkatnya pengembangan PAD						0		0		0		0		0	
	Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD (%)	113,03			100		100		100		100		100		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.653.278.000		2.707.245.674,52		2.775.955.569,74		2.851.433.801,67		2.949.637.181,81	
Meningkatnya ketercapaian target pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2			2	160.646.000	2	163.913.539,64	2	168.073.665,28	2	172.643.588,23	2	178.589.433,42	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6			3		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12			12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2			2		2		2		2		2		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						5.522.000		5.634.317,48		5.777.316,46		5.934.401,69		6.138.782,49	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	7.058.000,00	2	5.522.000	2	5.634.317,48	2	5.777.316,46	2	5.934.401,69	2	6.138.782,49	
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						95.742.000		97.689.392,28		100.168.749,06		102.892.337,34		106.435.949,44	
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6	2	123.600.000,00	3	95.742.000	1	97.689.392,28	1	100.168.749,06	1	102.892.337,34	1	106.435.949,44	
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						30.492.000		31.112.207,28		31.901.835,1		32.769.246		33.897.818,83	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12			12	30.492.000	12	31.112.207,28	12	31.901.835,1	12	32.769.246	12	33.897.818,83	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						28.890.000		29.477.622,6		30.225.764,66		31.047.603,2		32.116.882,66	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	20.880.000,00	2	28.890.000	2	29.477.622,6	2	30.225.764,66	2	31.047.603,2	2	32.116.882,66	
Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan						0		0		0		0		0	
	Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar (Persentase)	179,74			100		100		100		100		100		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.653.278.000		2.707.245.674,52		2.775.955.569,74		2.851.433.801,67		2.949.637.181,81	
Menurunnya piutang pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12			12	939.862.000	12	958.978.793,08	12	983.317.674,85	12	1.010.054.082,42	12	1.044.840.345,02	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12			12		12		12						
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12			12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4			4		4		4		4		4		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						226.597.000		231.205.982,98		237.073.990,83		243.520.032,64		251.906.862,56	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	18	514.906.000,00	4	226.597.000	4	231.205.982,98	4	237.073.990,83	4	243.520.032,64	4	251.906.862,56	
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						73.444.000		74.937.850,96		76.839.773,62		78.929.047,06		81.647.363,44	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	12	76.000.000,00	12	73.444.000	12	74.937.850,96	12	76.839.773,62		78.929.047,06		81.647.363,44	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah						524.991.000		535.669.316,94		549.264.604,2		564.199.108,79		583.630.126,1	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	434.802.000,00	12	524.991.000	12	535.669.316,94	12	549.264.604,2	12	564.199.108,79	12	583.630.126,1	
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						114.830.000		117.165.642,2		120.139.306,2		123.405.893,93		127.655.992,92	
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12	1000	112.980.000,00	12	114.830.000	12	117.165.642,2	12	120.139.306,2	12	123.405.893,93	12	127.655.992,92	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah unsur penunjang urusan keuangan mempunyai peranan dalam mewujudkan Visi Wali Kota yang sudah ditetapkan yaitu Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Lestari dan Berkeadaban, mendukung misi yang ke empat yaitu Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Daerah Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY dengan Sasaran Daerah Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan melalui Program strategis Penguatan akses pendanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui program Pengelolaan Pendapatan daerah, program Pengelolaan Barang milik Daerah, dan program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara terperinci kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 :

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
3.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya pengembangan PAD	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya pengembangan PAD	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Ketercapaian Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya pengembangan PAD	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU BPKAD Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4. 4 Indikator kinerja utama rancangan akhir renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU
2	Persentase PAD	%	119,28	100	100	100	100	100	100	IKU
3	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	92,61	91,57	91,87	92,14	92,14	92,14	92,42	IKU
4	Nilai PAD	Rp	842.865.622.059	1.000.000.000.000	964.000.000.000	1.013.000.000.000	1.066.000.000.000	1.123.000.000.000	1.196.000.000.000	IKU

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. BPKAD Kota Yogyakarta tidak menentukan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4. 5 *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	IKK
2	Manajemen Aset		Persentase	4	4	4	4	4	4	4	IKK
3	Opini Laporan Keuangan		Indeks	10	10	10	10	10	10	10	IKK
4	Rasio PAD		Persentase	41,08	47	50,39	51,89	53,23	54,6	56,22	IKK

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.

Renstra BPKAD Kota Yogyakarta periode 2026-2030 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPKAD Kota Yogyakarta.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang berjalan maupun yang akan direncanakan, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Sebagai penutup, Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BPKAD beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BPKAD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah sebagai upaya pendukung dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2025
Kepala BPKAD Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Raden Roro Andarini, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 197203171997032004

LAMPIRAN 1.1. POHON KINERJA

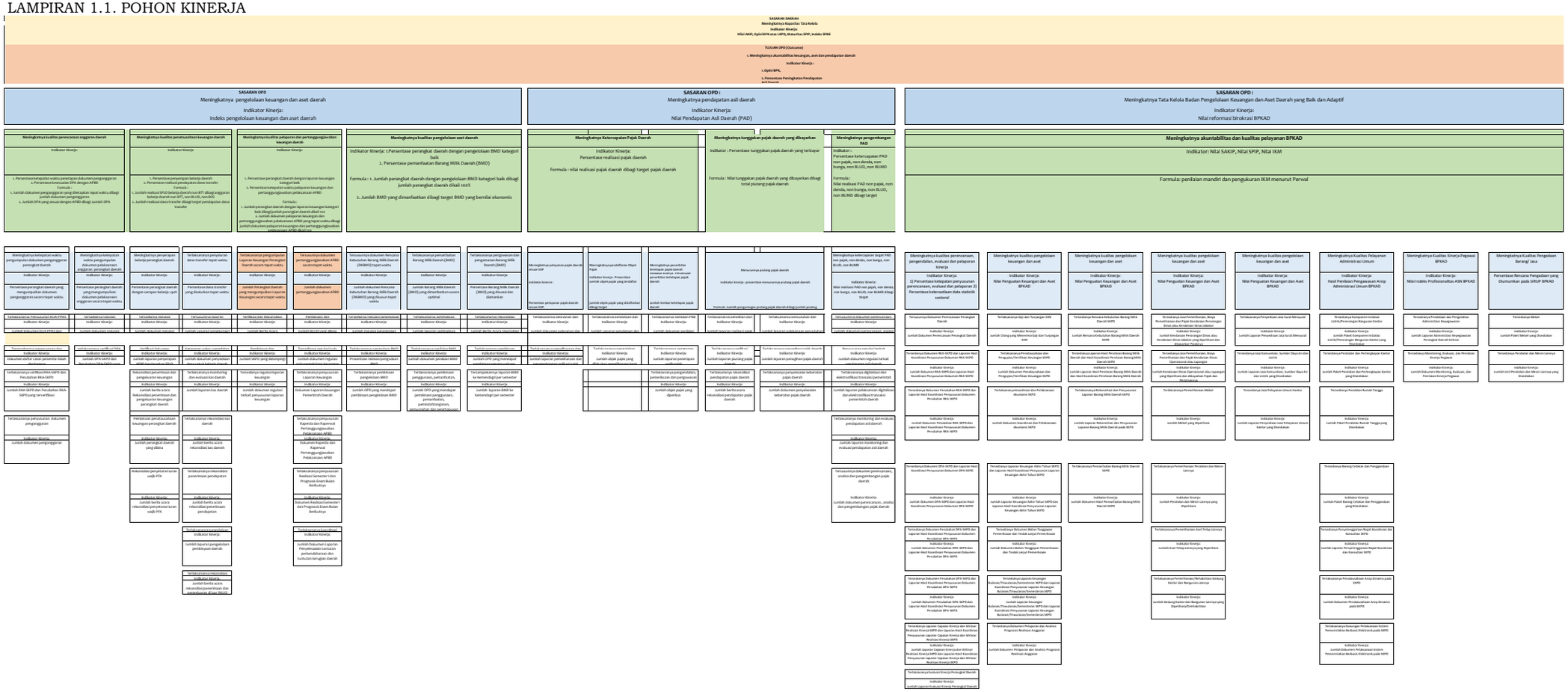

LAMPIRAN 1.2 DATA KINERJA

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan	Catatan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030		
1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah	Opini BPK					Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	FALSE	-
						Sumber Data :										FALSE	
						Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	FALSE	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dari pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n dibanding tahun n-1				(Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n dikurangi Realisasi Pendapatan Daerah tahun n-1) dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n-1 dikali 100	%	6.18%	11.35%	1.96%	4.40%	5.18%	5.35%	5.35%	6.50%	FALSE	
						Sumber data:										FALSE	
						Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n	rupiah	855,100,858,914.00	952,189,671,211.00	970,890,805,391	1,013,582,285,871	1,066,090,509,421	1,123,090,027,068	1,123,090,027,068	1,196,036,877,295	FALSE	
						Realisasi Pendapatan Daerah tahun n-1	rupiah	805,346,115,793.00	855,100,858,914.00	952,189,671,211	970,890,805,391	1,013,582,285,871	1,066,090,509,421	1,066,090,509,421	1,123,090,027,068	FALSE	
			1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	Dihitung dari Capaian Nilai IPKD + capaian IPAD (hasil perbandingan realisasi IPAD Tahun N dibanding Realisasi IPAD maksimal (4))	75% Capaian nilai IPKD + 25% capaian nilai IPAD	Nilai	92.61	91.57	91.87	92.14	92.14	92.14	92.14	92.42	FALSE	
						Sumber data:										FALSE	
						1. Capaian Nilai IPKD	Persen	98.65	97.26	97.65	98.02	98.02	98.03	98.03	98.39	FALSE	
						a. Nilai IPKD (40% perencanaan anggaran+	Nilai	98.65	97.26	97.65	98.02	98.02	98.03	98.03	98.39	FALSE	-
						Dimensi Perencanaan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	-
						Dimensi Penatausahaan Keuangan	%	95.5	95.75	95.84	95.85	95.85	95.86	95.86	95.86		
						Dimensi Pelaporan dan Pertanggungjawaba	%	100	95.12	96.34	97.56	97.56	97.56	97.56	98.78	FALSE	
						b. Nilai Tertinggi IPKD	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100		
						2. Capaian Nilai IPAD	Persen	74.50	75	75	75	75	75	75	75		
						a. Nilai IPAD	Nilai	2.98	3	3	3	3	3	3	3		
						b. Nilai Tertinggi IPAD	Nilai	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
			1.2. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai PAD		Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	Rupiah	842,865,622,059.51	1.000.000.000.000	964.000.000.000	1.013.000.000.000	1.066.000.000.000	1.123.000.000.000	1.123.000.000.000	1.196.000.000.000		
						Sumber data:											
						Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	842,865,622,059.51	1.000.000.000.000	964.000.000.000	1.013.000.000.000	1.066.000.000.000	1.123.000.000.000	1.123.000.000.000	1.196.000.000.000		
			1.3. Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan	Nilai reformasi birokrasi BPKAD		Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Insp	Nilai	A (88.32)	A (88.32-88.35)	A (88.33-88.36)	A (88.34-88.37)	A (88.35-88.38)	A (88.36-88.39)	A (88.36-88.39)	A (88.37-88.40)		
						Sumber data:											
						Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspekt	Nilai	88.32	88.32-88.35	88.33-88.36	88.34-88.37	88.35-88.38	88.36-88.39	88.36-88.39	88.37-88.40		

LAMPIRAN 1.2 DATA KINERJA

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan, aset dan pendapatan daerah	Opini BPK					Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						Sumber Data :									
						Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dari pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n dibanding tahun n-1				(Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n dikurangi Realisasi Pendapatan Daerah tahun n-1) dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n-1 dikali 100	%	6.18%	11.35%	1.96%	4.40%	5.18%	5.35%	5.35%	6.50%
						Sumber data:									
						Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n	rupiah	855,100,858,914.00	952,189,671,211.00	970,890,805,391	1,013,582,285,871	1,066,090,509,421	1,123,090,027,068	1,123,090,027,068	1,196,036,877,295
						Realisasi Pendapatan Daerah tahun n-1	rupiah	805,346,115,793.00	855,100,858,914.00	952,189,671,211	970,890,805,391	1,013,582,285,871	1,066,090,509,421	1,066,090,509,421	1,123,090,027,068
			1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	Dihitung dari Capaian Nilai IPKD + capaian IPAD (hasil perbandingan realisasi IPAD Tahun N dibanding Realisasi IPAD maksimal (4))	75% Capaian nilai IPKD + 25% capaian nilai IPAD	Nilai	92.61	91.57	91.87	92.14	92.14	92.14	92.14	92.42
						Sumber data:									
						1. Capaian Nilai IPKD	Persen	98.65	97.26	97.65	98.02	98.02	98.03	98.03	98.39
						a. Nilai IPKD (40% perencanaan anggaran+	Nilai	98.65	97.26	97.65	98.02	98.02	98.03	98.03	98.39
						Dimensi Perencanaan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
						Dimensi Penatausahaan Keuangan	%	95.5	95.75	95.84	95.85	95.85	95.86	95.86	95.86
						Dimensi Pelaporan dan Pertanggungjawaban	%	100	95.12	96.34	97.56	97.56	97.56	97.56	98.78
						b. Nilai Tertinggi IPKD	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
						2. Capaian Nilai IPAD	Persen	74.50	75	75	75	75	75	75	75
						a. Nilai IPAD	Nilai	2.98	3	3	3	3	3	3	3
						b. Nilai Tertinggi IPAD	Nilai	4	4	4	4	4	4	4	4
			1.2. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai PAD		Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	Rupiah	842,865,622,059.51	1,000,000,000,000	964,000,000,000	1,013,000,000,000	1,066,000,000,000	1,123,000,000,000	1,123,000,000,000	1,196,000,000,000
						Sumber data:									
						Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	842,865,622,059.51	1,000,000,000,000	964,000,000,000	1,013,000,000,000	1,066,000,000,000	1,123,000,000,000	1,123,000,000,000	1,196,000,000,000
			1.3. Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai reformasi birokrasi BPKAD		Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Insp	Nilai	A (88,32)	A (88,32-88,35)	A (88,33-88,36)	A (88,34-88,37)	A (88,35-88,38)	A (88,36-88,39)	A (88,36-88,39)	A (88,37-88,40)
						Sunber data:									
						Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspekto	Nilai	88.32	88,32-88,35	88,33-88,36	88,34-88,37	88,35-88,38	88,36-88,39	88,36-88,39	88,37-88,40

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165
Telp. (0274) 556919, 515865, 562682 Fax (0274) 555013
email : bkpsdm@jogjakota.go.id
Website : www.bkpsdm.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan program kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta dan arah kebijakan nasional dalam bidang kepegawaian, khususnya yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya aparatur, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, serta mewujudkan profesionalitas ASN yang *literate,* kompeten, berakhlak, berkinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 September 2025
Plt. Kepala BKPSDM Kota
Yogyakarta

Dedi Budiono, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196708041999031007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN **01**
1.1 Latar Belakang 01
1.2 Dasar hukum penyusunan 03
1.3 Maksud dan tujuan 06
1.4 Sistematika penulisan 06

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **08**
2.1 Gambaran pelayanan BKPSDM Kota Yogyakarta 08
2.1.1 Tugas dan fungsi BKPSDM Kota Yogyakarta 08
2.1.2 Sumberdaya BKPSDM Kota Yogyakarta 10
2.1.3 Keadaan pegawai 11
2.1.4 Keadaan sarana dan prasarana BKPSDM Kota Yogyakarta 13
2.1.5 Capaian Kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta 14
2.1.6 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah 17
2.2 Permasalahan dan isu strategis BKPSDM Kota Yogyakarta.. 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **23**
3.1. Tujuan BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029 23
3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029 23
3.3. Strategi BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029 24
3.4. Arah kebijakan BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAANBIDAN URUSAN **34**
4.1 Perencanaan di BKPSDM Kota Yogyakarta 34
4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPSDM 34
4.3 Kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif serta dukungan program prioritas pembangunan BKPSDM 37
4.3.1 Identifikasi program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD 37
4.3.2 Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan 51
4.3.3 Kerangka pendanaan urusan keistimewaan 2026-2030 78
4.3.4 Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan 80
4.4 IKU BKPSDM Kota Yogyakarta 82
4.5 IKK BKPSDM Kota Yogyakarta 85

BAB V PENUTUP **87**

LAMPIRAN **88**

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tabel jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 11
Tabel 2.2 Tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan 11
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan 12
Tabel 2.4 Keadaan sarana dan prasarana BKPSDM 13
Tabel 2.5 Skala nilai peringkat kinerja 14
Tabel 2.6 Rumusan indikator dan formula perhitungan 15
Tabel 2.7 Perbandingan capaian indikator sasaran strategis 2020-2024 15
Tabel 2.8 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Formulasi Perhitungan 16
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024 17
Tabel 2.10 Teknis menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 20
Tabel 3.1 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra PD 23
Tabel 3.2 Strategi SWOT (SO-WO-ST-WT) 24
Tabel 3.3 Penentuan alternatif strategi 25
Tabel 3.4 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran PD 28
Tabel 3.5 Teknik merumuskan arah kebijakan RENSTRA 30
Tabel 4.1 Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD 38
Tabel 4.2 Rencana Program /kegiatan/subkegiatan dan pendanaan 52
Tabel 4.3 Kerangka pendanaan urusan keistimewaan 2026-2030 79
Tabel 4.4 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah 80
Tabel 4.5 IKU BKPSDM 84
Tabel 4.6 IKK BKPSDM 86

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kota Yogyakarta 10

BAB 1
Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

1. *Latar belakang*
2. *Dasar hukum penyusunan*
3. *Maksud dan tujuan*
4. *Sistematika penulisan*

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh instansi pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra merupakan dokumen yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program serta indikator kinerja. Renstra berfungsi sebagai pedoman utama bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah {RKPD dan Renja PD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing masing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan itu mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas

penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program kepala daerah serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, BKPSDM perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, serta sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra BKPSDM ini disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, tantangan dan kebutuhan reformasi birokrasi, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Keterkaitan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta dengan RPJMD Kota Yogyakarta dalam perencanaan jangka menengah 2025-2029.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029.

a. Visi: Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban;
b. Misi ke 4: Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945. Salah satu strategi dalam mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu **peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis meritokrasi.**
c. Tujuan: Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY. Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi.
d. Sasaran: Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Indikator Sasaran: Nilai AKIP.

Keterkaitan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta dengan Renstra BKN dalam perencanaan jangka menengah 2025-2029.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BKN (Badan Kepegawaian Negara) 2025-2029.

a. Visi : terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan visi Presiden yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.
b. Misi : (1). memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjamin kualitas meritokrasi; (2). mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

c. Tujuan : meningkatkan kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan *Human Capital Development.*
d. Sasaran Strategis : (1). meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi; (2). meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional dan akuntabel serta berbasis digital.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra BKN 2025-2029, maka keterkaitan antara Renstra BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Renstra BKN (Badan Kepegawaian Negara) sangat penting, karena keduanya bergerak dalam sistem manajemen kepegawaian yang terintegrasi secara nasional. Keterkaitan keduanya sebagai berikut:

a. Keterkaitan dalam tugas dan fungsi, di dalam Renstra BKN menargetkan penerapan sistem merit di seluruh instansi, maka Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta akan mencantumkan strategi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
b. Keterkaitan dalam keselarasan perencanaan program dan kegiatan Renstra BKN menjadi rujukan normatif dalam menyusun program dan kegiatan strategis kepegawaian di daerah. Renstra BKPSDM menyusun kegiatan seperti pengembangan kompetensi, manajemen talenta, penilaian kompetensi, dan pengelolaan kinerja ASN berdasarkan kebijakan dan regulasi dari BKN.
c. Keselarasan indikator dan target kinerja Renstra BKN yang memuat indikator: (1) persentase K/L/D yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik; (2). Indek Reformasi Birokrasi BKN. Renstra BKPSDM menurunkan indikator tersebut menjadi indikator kinerja daerah, dengan tetap mendukung pencapaian target nasional, dalam hal ini indikator sasaran yang tertuang di Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta adalah Indek sistem Merit.
d. Mendukung terhadap RPJMN dan RPJMD. Renstra BKN mendukung RPJMN, terutama dalam bidang penguatan SDM ASN. Renstra BKPSDM mendukung RPJMD kepala daerah, namun tetap harus inline dengan arah nasional dari BKN.

1.2 Dasar hukum penyusunan

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana strategis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Redistribusi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pelaksana;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 157 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2024 tentang Dompet Pelatihan (jogja Learning Wallet);
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek kepegawaian dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029 antara lain :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
b. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
f. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD 2025-2029, Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya (2023-2026);

2.2 Mengulas permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Pada bagian ini dikemukakan tujuan Renstra Tahun 2025-2029;

3.2 Pada bagian ini dikemukakan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

3.3. Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029.

3.4. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif, serta uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas, target IKK dan IKU.

BAB V PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab 2 Berisi :

1. *Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;*
2. *Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.*

2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM Kota Yogyakarta

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. BKPSDM dibentuk sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pembinaan ASN sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja inspektorat daerah dan badan daerah, tugas BKPSDM Kota Yogyakarta yaitu membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta menjalankan fungsinya di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, antara lain:

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan *Corporate University* (Corpu);
i. Pengoordinasian penyelenggaraan *Human Capital Development Plan*;
j. Pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
k. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Badan;

l. Pengoordinasian penguatan budaya kerja atas *core value* ASN;
m. pengoordinasian penguatan employer branding ASN bangga melayani bangsa;
n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
o. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
p. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
q. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
r. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
t. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
u. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugas Badan.

Susunan Organisasi BKPSDM Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan;
d. Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan;
e. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional Administrasi Kepegawaian;
f. Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terdiri atas Jabatan Fungsional Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
g. Unit Pelaksana Teknis.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditunjukan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

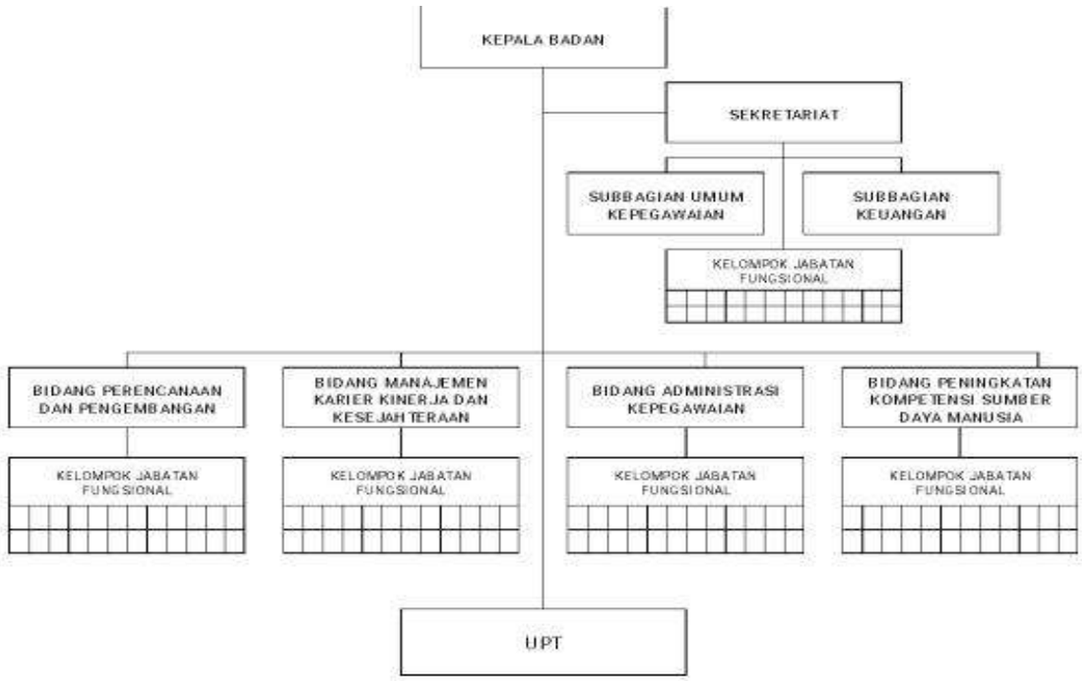

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

2.1.2 Sumberdaya BKPSDM Kota Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM didukung oleh berbagai sumber daya yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia SDM

BKPSDM memiliki pegawai ASN (PNS dan PJLOP) dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur. Aspek SDM di BKPSDM Kota Yogyakarta meliputi:

1. Jumlah pegawai per bidang/sekretariat/UPT;
2. Kualifikasi pendidikan (SMA, D3, S1, S2);
3. Kompetensi teknis dan manajerial;
4. Ketersediaan pejabat fungsional (Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan, Asessor, Perencana, Pranata Komputer, dll);

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya anggaran BKPSDM berasal dari APBD dan Dana Keistimewaan yang dialokasikan untuk:

1. Belanja langsung (barang jasa dan modal);
2. Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai);

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

BKPSDM didukung oleh fasilitas kerja yang meliputi:

1. Ruang kerja, ruang rapat, ruang asessment/wawancara, ruang arsip;
2. Perangkat komputer, printer dan jaringan internet;
3. Mushola;
4. Kendaraan operasional.

2.1.3 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta per Juli 2025 sebanyak 68 orang, terdiri dari 65 Orang ASN dan 3 Orang PJLOP dengan tingkat pendidikan S1. Rincian tingkat pendidikan 65 Orang ASN sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	0 orang	0 orang	0 orang
2.	SMP/Sederajad	0 orang	0 orang	0 orang
3.	SMA/Sederajat	7 orang	1 orang	8 orang
4.	D3	5 orang	8 orang	13 orang
5.	D4	1 orang	1 orang	2 orang
6.	S1	12 orang	10 orang	22 orang
7.	S2	4 orang	16 orang	20 orang
			Jumlah	65 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Jumlah total pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta sebanyak 65 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan latar belakang pendidikan yang beragam.Sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan SMA/sederajat diikuti oleh 8 orang (7 laki-laki dan 1 perempuan).
2. Pendidikan Diploma (D3 dan D4) diikuti oleh 15 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 9 perempuan.
3. Pendidikan Sarjana (S1) merupakan jenjang terbanyak, yaitu 22 orang (12 laki-laki dan 10 perempuan).
4. Pendidikan Magister (S2) diikuti oleh 20 orang, didominasi oleh perempuan (4 laki-laki dan 16 perempuan).
5. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan SD atau SMP.

Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai BKPSDM telah memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi, yang sejalan dengan tuntutan profesionalisme dalam pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM.

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	0 orang	6 orang	6 orang
2.	Golongan III	26 orang	23 orang	49 orang
3.	Golongan II	3 orang	7 orang	10 orang
4.	Golongan I	0 orang	-	0 orang
			Jumlah	65 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Jumlah pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta sebanyak 65 orang, tersebar dalam tiga golongan kepegawaian. Mayoritas pegawai berada pada Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Golongan IV diisi oleh 6 orang, seluruhnya berjenis kelamin perempuan.
2. Golongan III merupakan golongan terbanyak, yaitu 49 orang, terdiri dari 26 laki-laki dan 23 perempuan.
3. Golongan II diisi oleh 10 orang (3 laki-laki dan 7 perempuan).
4. Tidak terdapat pegawai dalam Golongan I.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat golongan menengah ke atas, yang mencerminkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup tinggi dalam mendukung tugas dan fungsi BKPSDM.

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	0 orang	0 orang	0 orang
2.	Sekretaris	0 orang	1 orang	1 orang
3.	Kepala Bidang	0 orang	3 orang	3 orang
4.	Kepala UPT dan KTU UPT	1 orang	1 orang	2 orang
5	Kepala Sub Bagian	1 orang	1 orang	2 orang
6.	JF Tertentu	11 orang	15 orang	26 orang
7.	JF Pelaksana	16 orang	15 orang	31 orang
			Jumlah	65 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

Jumlah ASN BKPSDM Kota Yogyakarta sebanyak 65 orang, yang tersebar dalam berbagai jenis jabatan struktural dan fungsional. Komposisi ini menunjukkan dominasi jabatan fungsional dalam struktur kepegawaian BKPSDM, yang sejalan dengan peran teknis dan pelayanan profesional yang dijalankan.Distribusi jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan yang terbanyak, yaitu 26 orang (11 laki-laki dan 15 perempuan);
2. Jabatan Fungsional Pelaksana berjumlah 31 orang (16 laki-laki dan 15 perempuan);
3. Jabatan struktural berjumlah 8 orang (2 laki-laki dan 6 perempuan);
4. Tidak terdapat pegawai yang menjabat sebagai Kepala Badan Definitif, dalam data ini (kosong).

Komposisi ini menunjukkan dominasi jabatan fungsional dalam struktur kepegawaian BKPSDM, yang sejalan dengan peran teknis dan pelayanan profesional yang dijalankan.

2.1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket
1	Alat-alat berat:				
	Mesin pompa air	2 unit	Baik	2 unit	
2	Alat Angkutan:				
	1) Roda 4	4 unit	Baik	4 unit	
	2) Roda 2	14 unit	Baik	17 unit	1 Rusak
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga:				
	1) Mesin ketik	1 unit	Baik	5 unit	
	2) Kalkulator	9 unit	Baik	18 unit	
	3) Rak kayu	12 unit	Baik	12 unit	
	4) Rak besi	8 unit	Baik	8 unit	
	5) Power supplay	1 unit	Baik	1 unit	
	6) Filling cabinet	24 unit	Baik	24 unit	
	7) Swithhub	1 unit	Baik	1 unit	
	8) Almari sorok	18 unit	Baik	18 unit	
	9) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	10) Almari besi metal	36 unit	Baik	36 unit	
	11) Almari kayu	5 unit	Baik	5 unit	
	12) Papan visual	1 unit	Baik	1 unit	
	13) Whiteboard	9 unit	Baik	9 unit	
	14) Mesin presensi sidik jari	1 unit	Rusak	0 unit	1 Rusak
	15) Pemotong kertas	2 unit	Baik	2 unit	
	16) Layar proyektor	8 unit	Baik	8 unit	
	17) Kaca hias	2 unit	Baik	2 unit	
	18) Kursi hadap depan	21 unit	Baik	21 unit	
	19) Audio kaset recorder	1 unit	Baik	7 unit	
	20) Slide proyektor	1 unit	Baik	1 unit	
	21) Peralatan cetak ID card	1 unit	1 Rusak	1 unit	
	22) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	23) Kursi tamu	23 unit	Baik	23 unit	
	24) Sofa	1 set	Baik	1 set	
	25) Meja rapat	154 unit	Baik	154 unit	
	26) Meja kubikel	33 unit	Baik	33 unit	
	27) Meja ketik	1unit	Baik	3 unit	
	28) Meja komputer	10 unit	Baik	10 unit	
	29) Kursi putar	24 unit	Baik	24 unit	
	30) Kursi kerja	48 unit	Baik	48 unit	
	31) Kursi rapat	274 unit	Baik	274 unit	
	32) Kursi biasa	22 unit	Baik	22 unit	
	33) Almari es	2 unit	Baik	2 unit	
	34) Jam elektronik	10 unit	Baik	10 unit	
	35) AC	13 unit	Baik	13 unit	
	36) Kipas angin	15 unit	Baik	15 unit	
	37) TV	2 unit	Baik	2 unit	
	38) Tape Recorder	1 unit	Baik	1 unit	
	39) Wireless	1 unit	Baik	1 unit	
	40) Komputer PC	27 unit	Baik	27 unit	1 Rusak
	41) Laptop	194 unit	Baik	194 unit	1 Rusak
	42) Notebook	11 unit	Baik	11 unit	2 Rusak

	43) Printer	42 unit	Baik	42 unit	2 Rusak
	44) LCD	6 unit	Baik	6 unit	3 Rusak
	45) Kamera	2 unit	Baik	3 unit	
	46) Pesawat telepon & airphone	5 unit	Baik	12 unit	
	47) Mesin faximile	1 unit	Baik	1 unit	
	48) Tangga aluminium	1 unit	Baik	1 unit	
	49) Buku pustaka	279 judul	Baik	300 judul	
	50) Handy talky	5 unit	Baik	5 unit	
	51) Barcode scanner	4 unit	Baik	4 unit	
	52) Metal detector	2 unit	Baik	2 unit	
	53) Genset	1 unit	Baik	1 unit	
	54) Kardex besi (lemari dorong)	1 unit	Baik	1 unit	
	55) Lampiker	1 unit	Baik	1 unit	
	56) CCTV	2 set	Baik	2 set	
	57) Multidisplay/video wall	4 unit	Baik	4 unit	
	58) Meja setengah biro	61 unit	Baik	61 unit	
	59) Kursi lipat	61 unit	Baik	61 unit	
	60) Air cleaner	10 unit	Baik	10 unit	
	61) Micropone floorstand	1 unit	Baik	1 unit	
	62) Stabilisator	2 unit	Baik	2 unit	
	63) Gambar presiden	3 set	Baik	3 set	
	64) Printer scanner	14 unit	Baik	14 unit	3 rusak
4	Gedung dan Bangunan:				
	1) Gedung BKPSDM	1 unit	Baik	1 unit	
	2) Gedung UPT Penilaian Kompetensi	1 unit	Baik	1 unit	
	3) Gedung UPT Diklat	-	-	1 unit	
	4) Ruang Merokok	1 unit	Baik	1 unit	

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

2.1.5 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kota Yogyakarta.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta 2020-2024

Tolok ukur capaian sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tersebut yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara. Penambahan formula indikator di Tahun 2023-2026 karena ada ketentuan setiap bidang boleh menggunakan program yang sama hanya saja harus memiliki indikatornya masing-masing agar kinerja dan SKP nya dapat di ukur. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator ditunjukan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator 2017-2022	Formula Indikator 2023-2026
1	2	3	4	5
1.	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	50% persentase pemenuhan ASN + 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan	20% pemenuhan penataan ASN + 10% jabatan fungsional yang terlayani + 15% ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 5% jumlah data ASN yang dikelola + 15% pelayanan kesejahteraan pegawai + 10% penyelesaian penilaian kinerja pegawai + 5% ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan + 20% Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

(Sumber: Meta Data Kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta)

Perbandingan dari tahun ke tahun dari pengukuran realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di ukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran Perangkat Daerah ditunjukan pada Tabel 2.7 tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis Tahun 2020-2024.

Tabel 2.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2020	91,69*	92.00	99.66
2.	2021	91,80*	95,44	103,96
3.	2022	91,85*	106,15	115,56
4.	2023	91,88	110,23	119,97
5.	2024	92,27	103,57	112,24

(Sumber: LAKIP BKPSDM Kota Yogyakarta)

*Ket. * Sesuai hasil Reviu Renstra.*

Berdasarkan data pada Tabel 2.7, selama kurun waktu lima tahun (2020–2024) capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dan progresif. Pada tahun 2020,

meskipun capaian belum sepenuhnya mencapai target (99,66%), hasil tersebut tetap mencerminkan kinerja yang mendekati sasaran dan menjadi landasan penting bagi peningkatan capaian di tahun-tahun berikutnya. Sejak tahun 2021, realisasi kinerja mulai melampaui target dengan signifikan.

Pada tahun 2021, tingkat capaian meningkat menjadi 103,96%, kemudian melonjak drastis pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 115,56% dan 119,97%. Ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, peningkatan produktivitas, dan manajemen kinerja yang optimal. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian tetap berada pada angka yang tinggi, yaitu 112,24%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Dengan capaian yang selalu berada di atas 100% sejak tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa organisasi tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga mampu melampauinya secara konsisten.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Yogyakarta 2020-2024.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang paling penting dan strategis dalam mencerminkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), capaian IKK menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 2.8 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Formulasi Perhitungan

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1.	Kepegawaian	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\left(\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk, guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk, guru dan tenaga kesehatan)}}\right)$
		Rasio pegawai fungsional (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\left(\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (Diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk, guru dan tenaga kesehatan)}}\right)$
2.	Pendidikan dan Pelatihan	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\left(\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (Diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk, guru dan tenaga kesehatan)}}\right)$

(Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019)

Perbandingan dari tahun ke tahun dari pengukuran realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di ukur dari **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** ditunjukan pada Tabel 2.9 tentang perbandingan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024.

Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020-2024

No.	Indikator	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi (%)	Rasio Pegawai Fungsional (%)	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat (%)
1.	2020	51,58	31,94	54,34
2.	2021	51,46	14,55	27,37
3.	2022	40,73	19,42	62,22
4.	2023	43,71	20,58	46,08
5.	2024	77,06	22,20	36,86

(Sumber: LPPD Kota Yogyakarta)

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepegawaian tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa:

a. Rasio pegawai berpendidikan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah sempat menurun pada tahun 2022–2023, capaian meningkat signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 77,06%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pendidikan aparatur.
b. Rasio pegawai fungsional cenderung berfluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 14,55% dan relatif stabil dalam rentang 19–22% pada periode 2022–2024. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya peralihan jabatan struktural ke fungsional dan rekrutmen CASN dalam jabatan fungsional.
c. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 (62,22%), namun menurun kembali pada 2023–2024, hingga mencapai 36,86% pada tahun terakhir. Kondisi ini menandakan perlunya konsistensi dalam pembinaan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional.

Secara umum, kinerja urusan kepegawaian menunjukkan adanya perbaikan terutama dari sisi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi jabatan fungsional dan pemenuhan sertifikasi kompetensi.

2.1.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah untuk BKPSDM Kota Yogyakarta antara lain:

a. Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan sasaran utama dalam seluruh layanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi;
b. Calon ASN (CPNS/PPPK), yaitu individu/masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan ASN;
c. Mitra teknis dalam pengelolaan kepegawaian (swasta, akademisi, praktisi);
d. Mayarakat umum/pencari informasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kota Yogyakarta.

Beberapa permasalahan atau tantangan utama yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta diantaranya masih belum optimalnya penempatan ASN dalam jabatan sesuai kompetensinya serta pengelolaan pola karier yang masih perlu ditata lebih optimal. Penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai kompetensi karena penerapan manajemen talenta masih dalam tahap pengembangan. Saat ini BKPSDM Kota Yogyakarta sedang membangun sistem aplikasi terintegrasi Manajemen Karier Jogja Unggul untuk mendukung pengelolaan karier ASN berbasis *merit system,*

Distribusi pegawai belum merata, terlihat dari adanya unit kerja yang kelebihan pegawai sementara unit lain kekurangan, ditambah keterbatasan jumlah SDM dibanding kebutuhan hasil analisis jabatan. Saat ini pelaksanaan redistribusi PNS pejabat pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan perencanaan redistribusi PNS dan data dukung sistem manajemen talenta yang saat ini masih dalam tahapan pengembangan. Redistribusi PNS pada jabatan pelaksana dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, dengan tetap memperhatikan sejumlah aspek penting. Aspek tersebut meliputi ketersediaan formasi, kesesuaian kompetensi dengan persyaratan dan klasifikasi jabatan, hasil penilaian kinerja, rekam jejak pegawai, serta posisi dalam kotak manajemen talenta. Selain itu, redistribusi hanya dapat dilakukan bagi pegawai yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Kualitas penilaian kinerja PNS masih perlu diperkuat. Hal ini terlihat dari proses penilaian yang belum sepenuhnya obyektif karena masih dipengaruhi subjektivitas personal, serta tindak lanjut terhadap hasil penilaian yang belum konsisten dalam pelaksanaannya.

Layanan kepegawaian berbasis sistem informasi masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan dukungan optimal terhadap pengelolaan ASN. Saat ini, belum seluruh layanan kepegawaian terintegrasi secara digital sehingga proses administrasi masih berjalan secara parsial. Di sisi lain, kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem informasi juga masih beragam, yang berdampak pada efektivitas dan konsistensi kualitas layanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan transformasi digital serta peningkatan kompetensi pegawai dalam penguasaan teknologi informasi.

Disiplin pegawai serta internalisasi *Core Value* BerAKHLAK masih menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam pengelolaan ASN. Kesadaran ASN dalam mengamalkan nilai dasar BerAKHLAK belum merata di seluruh jajaran, sehingga penerapan nilai tersebut belum berjalan secara konsisten. Selain itu, belum semua pimpinan pada berbagai jenjang jabatan mampu berperan sebagai teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai organisasi.

Layanan kesejahteraan pegawai masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan ASN, yang berdampak pada kepuasan dan motivasi kerja. Di sisi lain, profesionalisme PNS pada Jabatan Fungsional Tertentu juga masih perlu

diperkuat melalui peningkatan kompetensi teknis, pengembangan kapasitas berkelanjutan, serta dukungan sistem karier yang lebih jelas.

Tidak ada isu yang terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) di BKPSDM Kota Yogyakarta. Selanjutnya teknis menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah ditunjukan pada Tabel 2.10

Tabel 2.10 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manajemen ASN dan pengisian jabatan	Belum optimalnya penempatan ASN dalam jabatan sesuai kompetensinya	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Tuntutan profesionalisme global	Reformasi Birokrasi Nasional	Ketimpangan penempatan ASN	Penempatan ASN berdasarkan prinsip meritokrasi
Redistribusi ASN	Distribusi pegawai belum merata	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Perpindahan SDM lingkup global	Efisiensi belanja pegawai menjadi indikator kinerja pengelolaan fiskal daerah(maksimal 30% dari APBD)	Kebutuhan SDM	Distribusi pegawai
Pengembangan kompetensi ASN	Kompetensi ASN yang masih perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	*Global talent competition*	Penguatan kapasitas ASN (RPJMN)	Kesenjangan kompetensi di daerah	Peningkatanm kompetensi ASN
Pembinaan karier ASN	Belum optimalnya kepastian pengembangan karier PNS	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Kesempatan pengembangan karir yang sama di tingkat global	Merit system dan manajemen talenta nasional	Merit system dan manajemen talenta regional	Pengembangan karier bagi PNS
Penilaian kinerja ASN	Kualitas penilaian kinerja PNS perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas	-	-	Penilaian PKP akan mempengaruhi karir PNS, karena seorang PNS dianggap mampu/tidak mampu dalam	Peningkatan Kualitas Penilaian Kinerja Pegawai

		dan fungsi BKPSDM			penguasaan tugas sehari-hari nya dilihat dari hasil penilaian atasan, rekan sejawat dan bawahannya atas nilai PKP nya	
Sistem informasi kepegawaian	Layanan kepegawaian dengan sistem informasi perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Digitalisasi layanan publik	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian	Layanan kepegawaian berbasis Sistem Informasi
Disiplin dan budaya kerja ASN	Disiplin pegawai dan Core Value BerAKHLAK perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan beretika.	Nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK belum terinternalisasi di semua jenjang pemerintahan	Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN di beberapa OPD daerah Implementasi Core Values BERAKHLAK belum merata antar daerah	Peningkatan Disiplin pegawai dan *Core Value* Berakhlak
Kesejahteraan pegawai	Layanan kesejahteraan pegawai perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Tuntutan akan kesetaraan dan keadilan dalam sistem kesejahteraan pegawai sektor publik	Kesenjangan kesejahteraan antar Instansi K/L/PD	Ketimpangan layanan kesejahteraan antar kabupaten/ kota di DIY Keterbatasan anggaran daerah untuk tunjangan kinerja pegawai	Peningkatan Layanan kesejahteraan pegawai
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Profesionalisme PNS dalam JFT perlu ditingkatkan	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	Tuntutan global terhadap ASN fungsional yang kompeten dan agile sesuai standar pelayanan publik modern	Belum optimalnya implementasi reformasi JFT dan sistem merit di tingkat nasional	Kesenjangan kompetensi dan pengelolaan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) antar OPD dan kabupaten/ kota di DIY	Profesionalitas PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
Perencanaan kebutuhan ASN	Perencanaan ASN belum sesuai dengan sasaran Pemkot	Tidak terdapat ISU KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKPSDM	ASN belum disiapkan menghadapi transformasi global dan kebutuhan masa depan ASN belum disiapkan menghadapi transformasi global dan kebutuhan masa depan	Belum optimalnya perencanaan ASN berbasis sistem merit dan prioritas nasional	Ketidaksesuaian antara jumlah, jenis jabatan, dan distribusi ASN dengan kebutuhan pembangunan daerah di DIY	Perencanaan kebutuhan ASN sesuai dengan Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

			ASN belum disiapkan menghadapi transformasi global dan kebutuhan masa depan			

Sumber : Data BKPSDM Kota Yogyakarta, diolah dari regulasi nasional, RPJMD, dan analisis lingkungan strategis

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Tujuan Renstra*
2. *Sasaran Renstra*
3. *Strategi PD*
4. *Arah kebijakan PD*

3.1 Tujuan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029

Tujuan rencana strategis yaitu hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang selaras dengan visi dan misi instansi/organisasi. Tujuan bersifat strategis dan jangka menengah, menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, program, dan sasaran organisasi. Sasaran rencana strategis yaitu hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam periode perencanaan, sebagai penjabaran dari tujuan. Tujuan BKPSDM **"Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas".**

3.2 Sasaran Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 2025-2029

Sasaran menunjukkan perubahan yang ingin dicapai baik dalam kualitas, maupun kuantitas. Sasaran menjadi dasar penyusunan indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran. Sasaran 1 BKPSDM **"Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas"** dan Sasaran 2 BKPSDM **"Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif".** Tujuan dan sasaran serta indikator BKPSDM Kota Yogyakarta ditunjukan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas		Indek Profesionalitas ASN (Indeks)	84.17	85	85.25	85.50	85.75	86	86	
		Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	Indek Sistem Merit (Indeks)	93.78	97.84	98.21	98.44	98.70	98.98	98.98	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Nilai)	AA	A	A	A	A	A	A	

Sumber : Data Kinerja Tujuan Sasaran Perangkat Daerah, 2025-2029

3.3 Strategi BKPSDM Kota Yogyakarta

Strategi adalah pendekatan utama atau arah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan strategis, mencapai tujuan dan sasaran organisasi, menyesuaikan dengan dinamika global, nasional, regional, dan lokal.

Dalam merumuskan strategi BKPSDM Kota Yogyakarta menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pendekatan ini membantu melihat kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) secara menyeluruh, meningkatkan ketepatan strategi, dan strategi berbasis bukti *(evidence).* Analisis SWOT dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi jangka menengah BKPSDM Kota Yogyakarta, terutama untuk menyusun arah kebijakan dan program prioritas Renstra 2025–2029. Strategi dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi SWOT (SO-WO-ST-WT)

STRATEGI	PENJELASAN STRATEGI
a. S–O *(Strength–Opportunities)*	Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal
b. W–O *(Weakness–Opportunities)*	Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia
c. S–T *(Strength–Threats)*	Menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal
d. W–T *(Weakness–Threats)*	Meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada secara bersamaan

Strategi SWOT (SO-WO-ST-WT) berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun untuk BKPSDM Kota Yogyakarta dijabarkan di Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan/ *Strength (S):***	**Kelemahan/ *Weakness (W)*:**
	1. Dukungan regulasi kepegawaian yang jelas (UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja PNS, PermenPAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Kinerja ASN, dll) 2. SDM internal yang relatif kompeten dan adaptif terhadap digitalisasi. 3. Sistem informasi (SIM) yang terus dikembangkan. 4. Komitmen pimpinan terhadap Reformasi Birokrasi dan *core value* BERAKHLAK. 5. Ketersediaan data kepegawaian yang terarsip dan terkelola dengan baik. 6. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, keuangan daerah dan aset serta layanan umum di internal BKPSDM.	1. Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan talent *mapping*. 2. Distribusi ASN antar OPD belum merata dan belum adaptif terhadap perubahan beban kerja. 3. Penilaian kinerja belum sepenuhnya objektif 4. Masih rendahnya disiplin kerja serta belum sepenuhnya menaati *core value* BERAKHLAK. 5. Kesejahteraan ASN dari tunjangan kinerja bergantung kemampuan keuangan daerah. 6. Monitoring dan evaluasi internal belum sepenuhnya terintegrasi berbasis digital.
Peluang/ *Opportunities (O)*: 1. Dukungan pemerintah pusat dalam transformasi digital ASN melalui SPBE dan Satu Data ASN. 2. Manajemen ASN berbasis merit sistem untuk memperkuat tata kelola ASN yang profesional, adil, dan akuntabel. 3. Arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan efisiensi dan SDM unggul. 4. Kolaborasi dengan Swasta, PTN (Akademisi), Praktisi 5. Dukungan teknologi informasi untuk layanan kepegawaian yang lebih transparan dan cepat.	**Alternatif Strategi *(SO)* :** 1. Memperkuat dan mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Manajemen Karir Jogja Unggul (MKJU), serta sistem informasi lainnya yang menunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan 2. Mempercepat implementasi merit system dan manajemen talenta. 3. Meningkatkan penguatan layanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik. 4. Insersi budaya kerja, meningkatkan kompetensi ASN dengan kolaborasi kerja sama bersama praktisi,	**Alternatif Strategi *(WO)*:** 1. Pemanfaatan data serta informasi pegawai/profil pegawai (SIMPEG) secara menyeluruh guna mendukung implementasi manajemen talenta ASN. 2. Meningkatkan penataan distribusi ASN antar perangkat daerah secara adil, adaptif, dan efisien. 3. Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, adil, transparan, dan berbasis hasil. 4. Penegakan disiplin ASN dengan pengawasan berbasis sistem (UPIK, *Whitle Blower System)* dan insersi budaya Berakhlak dengan melibatkan

6. Dukungan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk administrasi umum dan aset, perencanaan/penganggaran, dan manajemen keuangan daerah.	akademisi, dan swasta. 5. Mitigasi risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 6. Optimalisasi perencanaan, pengelolaan anggaran, aset, dan layanan umum yang berbasis digital serta diperkuat melalui kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan tata kelola internal yang transparan.	praktisi, swasta dan akademisi. 5. Pengembangan kompetensi ASN terutama untuk OPD penghasil PAD, keberhasilan mereka berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. ASN di OPD ini tidak hanya dituntut profesional secara teknis, tetapi juga harus inovatif, melayani, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. 6. Meningkatkan integrasi sistem pengelolaan keuangan, perencanaan, dan aset berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi birokrasi.
Ancaman/*Threats (T)*: 1. Perubahan regulasi nasional yang cepat dan menuntut adaptasi cepat. 2. Kesenjangan kompetensi ASN 3. Terbatasnya formasi ASN dibandingkan kebutuhan riil SDM Pemerintah Daerah. 4. Dimungkinkan ada risko kecurangan dalam berbagai aspek kepegawaian dan pengembangan SDM. 5. Kebutuhan SDM berbasis beban kerja dan kompetensi. 6. Tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.	**Alternatif Strategi *(ST):*** 1. Meningkatkan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi melalui penguatan sistem informasi. 2. Memaksimalkan analisis kompetensi dan layanan digital, serta peran SDM unggul sebagai agen perubahan 3. Meningkatkan kemampuan digital/mengurangi administrasi manual, dan meningkatkan peran strategis ASN yang ada. 4. Meningkatkan insersi nilai BerAKHLAK dan anti korupsi dalam program pengembangan kompetensi serta meningkatkan keterlibatan pengawasan partisipatif, pencegahan kecurangan melalui Sistem Pengendalian Internal. 5. Pemanfaatan *database* ASN untuk perencanaan kebutuhan pegawai yang akurat. 6. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, serta layanan umum berbasis data dan teknologi yang didukung inovasi dan riset, guna menghadapi keterbatasan fiskal serta menjawab tuntutan transparansi publik dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.	**Alternatif Strategi *(WT):*** 1. Meningkatkan kemampuan ASN dan organisasi untuk merespons cepat perubahan regulasi, dan membangun sistem SDM yang menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dengan *talent mapping 9 box matrix.* 2. Meningkatkan penataan dan Pengembangan ASN secara terpadu dan adaptif (menggabungkan redistribusi SDM secara proporsional dengan peningkatan kompetensi). 3. Meningkatkan kinerja ASN melalui pemanfaatan SDM yang Ada berbasis kinerja yang objektif. 4. Penguatan Budaya Integritas dan Akuntabilitas melalui Sistem Pengawasan Internal. 5. Promosi berbasis sistem merit, membangun sistem penghargaan finansial/non finansial seperti *employee of the years.* 6. Penguatan sistem pengendalian internal dan monitoring berbasis digital untuk mencegah inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran.

Sumber: Data BKPSDM Kota Yogyakarta, diolah

Penahapan Rencana Strategis BKPSDM Kota Yogyakarta

Manfaat penahapan Renstra di BKPSDM Kota Yogyakarta antara lain:

a. Memberi arah yang jelas dalam menjabarkan langkah-langkah strategis secara sistematis dari awal hingga akhir periode;
b. Menjadi panduan agar pelaksanaan program sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029;
c. Memudahkan pengendalian dan evaluasi;
d. Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Program;
e. Sinkronisasi antar program dan kegiatan;
f. Persiapan sasaran dan program renscana strategi berikut.

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Yogyakarta yang dapat dijadikan acuan perencanaan lima tahunan di tunjukan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis BKPSDM Kota Yogyakarta

2025	TAHAP 1 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumusan Arah Strategis	Implementasi Awal Strategi	Penguatan Program Strategis	Evaluasi Tengah Periode dan Penyesuaian Strategi	Program Strategis pasca evaluasi tengah	Evaluasi Akhir dan Persiapan Suksesi Strategis Periode berikutnya
1. Menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra yang selaras dengan RPJMD. 2. Melakukan analisis lingkungan strategis (SWOT, KLHS, isu regional-nasional-global). 3. Menyusun baseline data kinerja kepegawaian dan SDM ASN. 4. Pemetaan potensi dan kelemahan manajemen ASN serta layanan kepegawaian. 5. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan. 6. Menyusun dokumen Renstra final BKPSDM. 7. Menyusun penilaian/ pemetaan kompetensi dan potensi pegawai 5 (lima) tahunan.	1. Optimalisasi layanan kepegawaian dengan Sistem Informasi 2. Pemetaan kebutuhan pegawai dan redistribusi ASN berbasis beban kerja. 3. Internalisasi core value BerAKHLAK dalam pelatihan ASN. 4. pengembangan kompetensi ASN berbasis talenta. 5. Implementasi merit system dan manajemen talenta dalam pengembangan karir pegawai	1. Digitalisasi proses kepegawaian. 2. Penguatan jejaring kerja sama (akademisi, swasta, praktisi). 3. Implementasi merit system. 4. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan layanan ASN.	1. Evaluasi capaian IKU dan sasaran Renstra hingga 2027. 2. Review strategi jika ada perubahan regulasi atau RPJMD. 3. Penyesuaian program prioritas berdasarkan hasil monev dan anggaran.	1. Penyempurnaan sistem manajemen talenta berbasis data. 2. Penajaman pendekatan pengembangan kompetensi ASN. 3. Penguatan budaya kerja adaptif dan inovatif.	1. Evaluasi akhir Renstra dan analisis capaian jangka menengah. 2. Persiapan awal penyusunan dokumen Renstra 2031–2035 (rancangan2 sasaran program kegiatan BKPSDM)

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pernyataan umum yang memberikan petunjuk, pedoman, atau landasan bagi penyusunan strategi, program, dan kegiatan dalam suatu rencana pembangunan atau manajemen organisasi. Unsur-Unsur dalam Arah Kebijakan:

a. Berorientasi pada visi dan misi organisasi dan akan diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program;
b. Menjadi dasar perencanaan strategis;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, Renja, dan penganggaran berbasis kinerja;
d. Menggambarkan prioritas dan fokus pembangunan;
e. Arah kebijakan muncul dari dari hasil analisis SWOT, isu lokal/nasional/global;
f. Mengarahkan implementasi program dan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih antar kegiatan, dan memastikan bahwa semua berjalan terintegrasi dan sinergis.

Proses perumusan arah kebijakan dalam dokumen Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta mengacu dari operasionalisasi NSPK dan keselarasan terhadap arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta. Proses perumusan arah kebijakan ini diawali dengan identifikasi kegiatan-kegiatan teknis (operasionalisasi NSPK) yang mencerminkan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan secara nasional dalam manajemen aparatur sipil negara. Setiap kegiatan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan pengelolaan ASN di daerah, serta mendukung pencapaian sistem merit.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut dipetakan terhadap arah kebijakan dalam RPJMD, yang dalam konteks ini menekankan pada penguatan pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur secara sistematis, adil, dan akuntabel. Sebagai turunan dari RPJMD, Renstra BKPSDM menetapkan 11 arah kebijakan yang mencakup perencanaan kebutuhan ASN, redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi, administrasi pengembangan kompetensi ASN, penilaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin, peningkatan kesejahteraan, pembinaan jabatan fungsional, sistem informasi terintegrasi, serta penyusunan formasi ASN.

Keterkaitan antara kolom operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan nasional, perencanaan pembangunan daerah, serta kebijakan perangkat daerah yang bersifat strategis yang ditunjukan pada Tabel 3.5.

.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya *Talent mapping* dengan 9-box matrix dan analisis gap kompetensi jabatan	Meningkatkan kualitas pengisian jabatan manajerial.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Manajemen Karir Jogja Unggul (MKJU) dalam pengisian jabatan/penempatan ASN. 2. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dengan *talent mapping 9 box matrix.* 3. Meningkatkan pemanfaatan hasil pemetaan sebagai dasar pengembangan karier dan suksesi kepemimpinan serta peningkatan kompetensi ASN.	
2.	Meningkatnya evaluasi beban kerja antar OPD dan redistribusi pegawai berbasis kebutuhan riil dan ABK.	Meningkatkan redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional	1. Meningkatkan penataan distribusi ASN antar perangkat daerah secara adil, adaptif, dan efisien. 2. Meningkatkan redistribusi ASN berbasis analisis beban kerja dan prioritas pembangunan daerah. 3. Meningkatkan penempatan pegawai yang tepat dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi.	
3.	Meningkatnya pelatihan teknis/fungsional/ leadership, *coaching,* mentoring, dan bimtek, sertifikasi kompetensi.	Meningkatkan pengembangan kompetensi	1. Memaksimalkan analisis kompetensi dan layanan digital, serta peran SDM unggul sebagai agen perubahan. 2. Meningkatkan kompetensi ASN terutama untuk OPD penghasil pendapatan daerah (keberhasilan mereka berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah) 3. Meningkatkan pemanfaatan kolaborasi dengan akademisi, praktisi, dan swasta. 4. Meningkatkan insersi nilai BerAKHLAK dan anti korupsi dalam program pengembangan kompetensi serta meningkatkan keterlibatan pengawasan	

			partisipatif, pencegahan kecurangan melalui Sistem Pengendalian Internal.	
4.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Meningkatkan penguatan layanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik. 2. Meningkatkan kualitas layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel	
5.	Meningkatnya penerapan e-kinerja berbasis hasil dan perilaku	Meningkatkan hasil pengukuran kinerja PNS	1. Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, adil, transparan, dan berbasis hasil. 2. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital untuk monitoring kinerja ASN.	
6.	Meningkatnya pengembangan SIMPEG, satu data ASN, pengembangan aplikasi kepegawaian.	Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi yang terintegrasi.	1. Meningkatkan transformasi digital layanan kepegawaian berbasis SPBE. 2. Mitigasi risiko SPBE.	
7.	Meningkatnya penegakan disiplin melalui sistem pengawasan (media aduan UPIK BKPSDM), sosialisasi dan pelatihan internalisasi nilai BerAKHLAK.	Menurunkan pelanggaran disiplin ASN.	1. Meningkatkan pemahaman budaya kerja ASN yang berintegritas, disiplin, dan selaras dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK). 2. Meningkatkan sistem pengawasan partisipatif dan responsif melalui media aduan UPIK. 3. Meningkatkan pemahaman ASN tentang nilai antikorupsi dan akuntabilitas dalam setiap program pengembangan kompetensi ASN.	
8.	Meningkatnya tunjangan kinerja ASN dan reward non-finansial	Meningkatkan layanan kesejahteraan ASN.	Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi ASN melalui: 1. Pemberian penghargaan atas kinerja terbaik melalui program *Employee of The Year* (EOTY), 2. Penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau (Bazar KORPRI), 3. Fasilitasi kepemilikan rumah pertama dan peluang investasi, pengelolaan dana pensiun bersama Taspen. 4. Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui sistem reward berbasis kinerja (TPP), 5. Meningkatkan Meningkatkan layanan perlindungan ASN melalui program JKK dan JKM.	

			6. Meningkatkan pengembangan KYOS (KORPRI Yogyakarta *Official Store)*.	
9.	Meningkatnya pembinaan teknis JF, pelatihan, uji kompetensi, pengembangan karier JF	Meningkatkan kualitas pengisian jabatan fungsional.	1. Meningkatkan profesionalisme ASN dalam Jabatan Fungsional sesuai kompetensi. 2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dalam pembinaan dan pengembangan JF.	
10.	Meningkatnya penyusunan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab–ABK, Koordinasi dengan BKN dan KemenPAN-RB	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN.	1. Meningkatkan pemanfaatan *database* pegawai untuk perencanaan kebutuhan pegawai yang akurat. 2. Meningkatkan perencanaan kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja.	
11.	Meningkatnya layanan administrasi pengembangan kompetensi	Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN.	1. Meningkatkan penguatan layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN berbasis elektronik dan penyederhanaan prosedur layanan.	
12.	Meningkatnya penilaian dan pemetaan kompetensi dan potensi pegawai 5 (lima) tahunan.	Meningkatkan akurasi penilaian/pemetaan kompetensi dan potensi untuk perencanaan karier dan pengembangan SDM aparatur	1. Meningkatkan penilaian/pemetaan kompetensi serta potensi pegawai secara berkala sebagai dasar penguatan manajemen talenta. 2. Meningkatkan pemanfaatan hasil penilaian dan pemetaan untuk perencanaan pengembangan karier dan program pelatihan ASN. 3. Meningkatkan akurasi data potensi ASN melalui penerapan metode *asessment* yang modern dan berbasis teknologi.	
13.	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah	Peningkatan kinerja pembangunan daerah, melalui: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam perencanaan pembangunan 3. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah	1. Melaksnakan penguatan program internal melalui optimalisasi perencanaan, *monitoring,* evaluasi, pelaporan, serta pengembangan budaya kerja yang adaptif dan inovatif 2. Meningkatkan pemanfaatan data dan analisis berbasis eviden untuk memperkuat akurasi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan internal BKPSDM berbasis kinerja dan sesuai regulasi	

		4. Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah 5. Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah 6. Meningkatkan kualitas inovasi daerah	4. Meningkatkan layanan administrasi umum, pengelolaan aset, dan tata naskah dinas yang efektif dan berbasis elektronik 5. Mengintegrasikan hasil riset dan kajian ilmiah ke dalam perumusan serta penetapan kebijakan pembangunan daerah agar lebih inovatif, adaptif, dan tepat sasaran. 6. Meningkatkan kualitas inovasi daerah melalui pengembangan ekosistem inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.	

(Sumber: Data BKPSDM Kota Yogyakarta, diolah.

CROSS CUTTING KINERJA

1.	BAPPEDA	: –	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
		–	Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD,
		–	Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2.	BPKAD	: –	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3.	BKPSDM	: –	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4.	Sekretariat Daerah	: –	Perumusan Kebijakan,
		–	Penyusunan Produk Hukum,
		–	Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik,
		–	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan,
		–	Kerja Sama Daerah,
		–	Pengendalian Pembangunan,
		–	Pengadaan Barang dan Jasa,
		–	Kesekretariatan
5.	Inspektorat	: –	Pengawasan dan *Consulting*
6.	Dinas Kominfo	: –	Pengembangan *e-government,* Penyelenggaraan Data Sektoral
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	: –	Pengelolaan kearsipan
8.	Satpol PP,Dinkes, DPK,DP3AP2KB, Dindag,Dindikpora, Dinbud,Dinpar, DPKU,DPP, Bangkesbangpol	: –	Fasilitasi lembaga profesi ASN (Korpri)

BAB 4

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 4 Berisi :

1. *Perencanaan BKPSDM*
2. *Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan*
3. *Uraian kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif , dukungan program prioritas pembangunan*
4. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*
5. *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

4.1 Perencanaan di BKPSDM Kota Yogyakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:

a. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah;
b. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran;
c. Merumuskan perencanaan program kepegawaian daerah dan pengembangan SDM;
d. Merumuskan penjabaran Rencana Program/ Kegiatan Tahunan;
e. Mencermati proporsi anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efektif dan efisien;
f. Memperhatikan regulasi perencanaan dan penganggaran.

4.2 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan BKPSDM Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung upaya pelayanan kepegawaian maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup, selain menyusun rencana upaya peningkatan pelayanan kepegawaian melalui:

1. Program Kepegawaian Daerah:
   a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan subkegiatan:
      a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
      b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
      c) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
      d) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
      e) Evaluasi Pemberhentian ASN;
      f) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
      g) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
      h) Pengelolaan Data Kepegawaian;
      i) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan subkegiatan:
    a) Pengelolaan Mutasi ASN;
    b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
    c) Pengelolaan Promosi ASN.
c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan subkegiatan:
    a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
    b) Pengelolaan *Assessment Center;*
    c) Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
    d) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
    e) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat;
    f) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;
    g) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN;
    h) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
    i) Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional;
    j) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.
d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan subkegiatan:
    a) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    b) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    c) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    d) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
    e) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai;
    f) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur;
    g) Pembinaan Disiplin ASN;
    h) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
    i) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
    j) Evaluasi Disiplin ASN.

2. Program pengembangan sumber daya manusia:
    a. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis, dengan subkegiatan:
        a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
        b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
        a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
        c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
        d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
        e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
d) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
e) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
f) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan:
a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
d) Pemeliharan/rehap gedung kantor dan bangunan lainnya;
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan:
   a. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintah, dengan subkegiatan:
      a) Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota.

Pada periode Renstra 2025–2029 terdapat satu subkegiatan yang dihapus, yaitu **Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.** Penghapusan ini dilakukan karena subkegiatan tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi BKPSDM Kota Yogyakarta saat ini.

4.3 Kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif serta dukungan program prioritas pembangunan

4.3.1 Identifikasi Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan adaptif, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta menyusun perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan berbasis kinerja. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

Merumuskan program dan kegiatan secara efektif sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di instansi pemerintah maupun organisasi lainnya. Berikut ini teknik merumuskan program dan kegiatan yang dapat diterapkan secara sistematis:

1. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan;
2. Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan;
3. Menyusun tujuan dan sasaran PD;
4. Menyusun program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, memetakan outcome;
5. Menjabarkan kegiatan, indikator subkegiatan, memetakan output.

Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD ditunjukan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas				Indek Profesionalitas ASN		
		Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas			Indek Sistem Merit		
			Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial		Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan manajerial sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	

			Meningkatnya pemahaman ASN tentang Keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta		Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	4.01.04.5.02.0003 - Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN		Persentase ASN yang melanggar disiplin	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya penegakan dan pembinaan disiplin ASN	Penjumlahan dari ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN		Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya penyelesaian layanan	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	

				administrasi pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5.03.02.2.03.0003 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	5.03.02.2.03.0006 - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5.03.02.2.03.0007 - Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	
			Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta		Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan program lembaga profesi ASN	Persentase efektifitas pelaksanaan program kerja lembaga profesi ASN	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
				Meningkatnya ketepatan waktu	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

				layanan kesejahteraan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
					Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	5.03.02.2.04.0006 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	
			Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional		Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya pelayanan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
					Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	5.03.02.2.03.0015 - Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	
			Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi		Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

				Meningkatnya pemanfaatan data yang terintegrasi untuk sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta		Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya tingkat kesadaran penilaian kinerja seluruh PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya kesesuaian perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

				anjab	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	5.03.02.2.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
			Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional		Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya ASN yang di distribusikan sesuai kebutuhan	Persentase ASN yang di distribusikan	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi		Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Meningkatnya kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	5.04.02.2.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	

					Pemerintahan Umum yang Disusun	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaia	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
					Jumlah Dokumen Hasil Evalu asi Pemberhentian ASN	5.03.02.2.01.0007 - Evaluasi Pemberhentian ASN	
				Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	

					antar Daerah		
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM		Nilai SAKIP BKPSDM	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP BKPSDM	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM BKPSDM	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BKPSDM	BKPSDM Persentase ketersediaan data statistik sectoral BKPSDM		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				aset	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BKPSDM	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.

Tujuan strategis yang hendak dicapai oleh BKPSDM Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas yang di ukur dengan Indek Profesionalitas ASN. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Perangkat Daerah yaitu meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas sebagaimana diukur melalui capaian indeks sistem merit dan meningkatnya tata kelola BKPSDM Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif. Dalam mendukung sasaran Perangkat Daerah, maka ditetapkan sejumlah sasaran program, di antaranya:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN, yang di ukur dari persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan;
2. Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta, yang di ukur dari persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan;
3. Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi yang terintegrasi, yang di ukur dari persentase modul sistem informasi yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, yang di ukur dari persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian
5. Meningkatnya redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional, yang di ukur dari persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah;
6. Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial yang di ukur dari persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi;
7. Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional yang di ukur dari persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi;
8. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN, yang di ukur dari Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN ;
9. Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta, yang di ukur dari persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal menguasai;
10. Menurunnya pelanggaran disiplin ASN, di ukur dari persentase ASN yang melanggar disiplin;
11. Meningkatnya pengembangan kompetensi, di ukur dari persentase pemenuhan pengembangan kompetensi;
12. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM, di ukur dari nilai SAKIP BKPSDM, nilai SPIP BKPSDM, nilai IKM BKPSDM.

Setiap sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam outcome dan output yang terukur, dengan indikator kinerja yang spesifik dan relevan ditunjukan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan.

4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				134.333.000		138.423.000		145.344.150		152.265.300		159.186.450		166.107.600		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**134.333.000**		**138.423.000**		**145.344.150**		**152.265.300**		**159.186.450**		**166.107.600**		
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaa (Persentase)	80	100	134.333.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya pemahaman ASN tentang Keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Persentase)	-	-	-	100	138.423.000	100	145.344.150	100	152.265.300	100	159.186.450	100	166.107.600	5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				134.333.000		138.423.000		145.344.150		152.265.300		159.186.450		166.107.600		
Meningkatnya jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	30	30	134.333.000	30	138.423.000	30	145.344.150	30	152.265.300	30	159.186.450	30	166.107.600		
4.01.04.5.02.0003 - Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan				134.333.000		138.423.000		145.344.150		152.265.300		159.186.450		166.107.600		

Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)	1	1	134.333.000	1	138.423.000	1	145.344.150	1	152.265.300	1	159.186.450	1	166.107.600		
5.03 - KEPEGAWAIAN				16.325.424.624		18.034.643.874		19.551.337.347		20.065.550.532		20.556.798.562		21.171.253.405		2117125 3405
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**11.860.809.924**		**14.394.508.874**		**14.687.283.647**		**15.060.074.232**		**15.469.492.062**		**16.002.190.205**		
Meningkatnya Nilai AkuntabilitasKinerja BKPSDM	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	11.860.809.924												
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM	Nilai SPIP BKPSDM (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	-	Terkelola dan Terukur	14.394.508.874	Terkelola dan Terukur	14.687.283.647	Terkelola dan Terukur	15.060.074.232	Terkelola dan Terukur	15.469.492.062	Terkelola dan Terukur	16.002.190.205	5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Nilai SAKIP BKPSDM (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
	Nilai IKM BKPSDM (Nilai)	93,03	93,1		93,2		93,4		93,5		93,6		93,8			
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.742.000		6.138.000		12.599.000		12.599.000		12.599.000		12.599.000		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan kinerja, dan keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM	9	9	17.742.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian, Evaluasi dan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan	-	-		100	6.138.000	100	12.599.000	100	12.599.000	100	12.599.000	100	12.599.000		

Pelaporan Kinerja BKPSDM	pelaporan BKPSDM															
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral BKPSDM	-	-		100		100		100		100		100			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.696.000		770.000		1.945.000		1.945.000		1.945.000		1.945.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2.696.000	3	770.000	3	1.945.000	3	1.945.000	3	1.945.000	3	1.945.000		
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				874.000		836.000		800.000		800.000		800.000		800.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	874.000	1	836.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000		
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.104.000		660.000		616.000		616.000		616.000		616.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.104.000	1	660.000	1	616.000	1	616.000	1	616.000	1	616.000		
5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				440.000		440.000		352.000		352.000		352.000		352.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	440.000	1	440.000	1	352.000	1	352.000	1	352.000	1	352.000		

5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				440.000		440.000		352.000		352.000		352.000		352.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	440.000	1	440.000	1	352.000	1	352.000	1	352.000	1	352.000		
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.098.000		1.672.000		6.840.000		6.840.000		6.840.000		6.840.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10.098.000	1	1.672.000	1	6.840.000	1	6.840.000	1	6.840.000	1	6.840.000		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.090.000		1.320.000		1.694.000		1.694.000		1.694.000		1.694.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.090.000	1	1.320.000	1	1.694.000	1	1.694.000	1	1.694.000	1	1.694.000		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.588.635.000		13.489.972.000		13.147.880.092		13.559.891.862		13.951.284.612		14.433.155.155		
Tersedianya Laporan administrasi Keuangan	Jumlah Laporan administrasi Keuangan BKPSDM	7	7	10.588.635.000	-	-	-	-'	-	-	-	-	-	-		
Terbayarkannya Gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	-	-	-	5	13.489.972.000	5	13.147.880.092	5	13.559.891.862	5	13.951.284.612	5	14.433.155.155		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.520.859.000		13.427.426.000		13.080.894.092		13.492.575.862		13.883.968.612		14.365.839.155		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	69	10.520.859.000	69	13.427.426.000	69	13.080.894.092	69	13.492.575.862	69	13.883.968.612	69	14.365.839.155		
5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				58.996.000		58.036.000		58.996.000		58.996.000		58.996.000		58.996.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	58.996.000	1	58.036.000	1	58.996.000	1	58.996.000	1	58.996.000	1	58.996.000		
5.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.100.000		2.970.000		4.770.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5.100.000	1	2.970.000	1	4.770.000	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000		
5.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				460.000		220.000		460.000		460.000		460.000		460.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000		
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				920.000		440.000		460.000		460.000		460.000		460.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	920.000	1	440.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000		

Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)														
5.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				920.000		440.000		920.000		920.000		920.000		920.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	920.000	1	440.000	1	920.000	1	920.000	1	920.000	1	920.000		
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				920.000		220.000		920.000		920.000		920.000		920.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	920.000	1	220.000		920.000		920.000		920.000		920.000		
5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				460.000		220.000		460.000		460.000		460.000		460.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000	1	460.000		
5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.702.000		2.233.000		3.702.000		3.702.000		3.702.000		3.702.000		
Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM	8	8	3.702.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	-	-	-	5	2.233.000	5	3.702.000	5	3.702.000	5	3.702.000	5	3.702.000		
5.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				483.000		275.000		483.000		483.000		483.000		483.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	483.000	1	275.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000		
5.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				483.000		275.000		483.000		483.000		483.000		483.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	483.000	1	275.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000		
5.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				483.000		275.000		483.000		483.000		483.000		483.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	483.000	1	275.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000		
5.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.287.000		858.000		1.287.000		1.287.000		1.287.000		1.287.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.287.000	1	858.000	1	1.287.000	1	1.287.000	1	1.287.000	1	1.287.000		
5.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				483.000		275.000		483.000		483.000		483.000		483.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	483.000	2	275.000	2	483.000	2	483.000	2	483.000	2	483.000		
5.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				483.000		275.000		483.000		483.000		483.000		483.000		

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	483.000	1	275.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000	1	483.000		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				575.000		275.000		575.000		575.000		575.000		575.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	1	575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BKPSDM	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	-	-	-	87,84 - 90,84	275.000	87,86 - 90,86	575.000	87,88 - 90,88	575.000	88,00 - 91,00	575.000	88,00 - 91,00	575.000		
5.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				575.000		275.000		575.000		575.000		575.000		575.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	575.000	2	275.000	2	575.000	2	575.000	2	575.000	2	575.000		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				496.351.574		258.075.724		503.776.805		526.993.150		552.699.500		580.976.600		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, paket peralatan rumah tangga, dan paket barang cetakan dan penggandaan	8	8	496.351.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM	-	-	-	74.9	258.075.724	75.0	503.776.805	75.1	526.993.150	75.2	552.699.500	75.2	580.976.600		
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.780.000		8.390.000		15.450.475		16.827.250		18.509.900		20.360.900		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.780.000	1	8.390.000	1	15.450.475	1	16.827.250	1	18.509.900	1	20.360.900		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				129.774.074		75.050.924		118.748.000		130.622.800		143.685.100		158.053.600		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	129.774.074	6	75.050.924	6	118.748.000	6	130.622.800	6	143.685.100	6	158.053.600		
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.696.000		10.475.000		11.765.600		12.942.100		14.236.300		15.660.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.696.000	1	10.475.000	1	11.765.600	1	12.942.100	1	14.236.300	1	15.660.000		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				92.279.500		34.279.800		84.108.530		92.519.300		101.771.300		111.948.400		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	92.279.500	1	34.279.800	1	84.108.530	1	92.519.300	1	101.771.300	1	111.948.400		
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.432.000		3.432.000		3.775.200		4.152.700		4.567.900		5.024.700		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.432.000	1	3.432.000	1	3.775.200	1	4.152.700	1	4.567.900	1	5.024.700		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				245.390.000		126.448.000		269.929.000		269.929.000		269.929.000		269.929.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	245.390.000	2	126.448.000	2	269.929.000	2	269.929.000	2	269.929.000	2	269.929.000		

5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.325.000		9.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		65.000.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5	5	26.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	-	-	-	5	9.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	65.000.000		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5	5	26.325.000		9.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		65.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	26.325.000	2	9.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	5	65.000.000		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.323.150		400.745.150		475.624.800		523.187.270		575.506.000		633.056.500		
Terlaksananya penyediaan Jasa prnunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	9	9	392.323.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM	-	-	-	100	400.745.150	100	475.624.800	100	523.187.270	100	575.506.000	100	633.056.500		
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.997.000		13.465.000		16.496.700		18.146.370		19.961.000		21.957.100		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	14.997.000	3	13.465.000	3	16.496.700	3	18.146.370	3	19.961.000	3	21.957.100		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.200.000		27.354.000		30.089.400		33.098.300		36.408.100		40.048.900		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	34.200.000	3	27.354.000	3	30.089.400	3	33.098.300	3	36.408.100	3	40.048.900		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				343.126.150		359.926.150		429.038.700		471.942.600		519.136.900		571.050.500		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	343.126.150	3	359.926.150	3	429.038.700	3	471.942.600	3	519.136.900	3	571.050.500		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335.156.200		228.070.000		443.125.950		333.125.950		273.125.950		273.125.950		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	122	122	335.156.200												
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM	-	-	-	5	228.070.000	5	443.125.950	5	333.125.950	5	273.125.950	5	273.125.950		
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				94.935.200		26.940.000		28.016.650		28.016.650		28.016.650		28.016.650		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	94.935.200	1	26.940.000	1	28.016.650	1	28.016.650	1	28.016.650	1	28.016.650		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.360.000		130.140.000		147.259.300		147.259.300		147.259.300		147.259.300		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	80.360.000	19	130.140.000	19	147.259.300	19	147.259.300	19	147.259.300	19	147.259.300		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.776.000		57.765.000		63.965.000		63.965.000		63.965.000		63.965.000		
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	69.776.000	100	57.765.000	103	63.965.000	103	63.965.000	103	63.965.000	103	63.965.000		

Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara (Unit)														
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		10.000.000		190.000.000		80.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000	1	10.000.000	1	190.000.000	1	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
5.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.085.000		3.225.000		13.885.000		13.885.000		13.885.000		13.885.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.085.000	1	3.225.000	1	13.885.000	1	13.885.000	1	13.885.000	1	13.885.000		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**4.464.614.700**		**3.640.135.000**		**4.864.053.700**		**5.005.476.300**		**5.087.306.500**		**5.169.063.200**		
Meningkatnya Kualitas manajemen Karier Kinerja dan kesejahteraan	Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai	92,2	92,4	481.471.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai (Persentase)	-	-	-	92	616.846.000	93,99	625.013.000	96,01	656.148.000	98,01	688.840.000	98,01	723.167.000	5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				983.467.000		1.034.792.000		1.173.082.000		1.246.107.000		1.298.507.000		1.333.495.000		
Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan evaluasi hasil penilaian dan	2	2	481.471.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	evaluasi kinerja aparatur															
Meningkatnya tingkat kesadaran penilaian kinerja seluruh PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	-	-	-	100	616.846.000	100	625.013.000	100	656.148.000	100	688.840.000	100	723.167.000		
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				479.431.000		614.714.000		622.700.000		653.835.000		686.527.000		720.854.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	479.431.000	1	614.714.000	1	622.700.000	1	653.835.000	1	686.527.000	1	720.854.000		
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2.040.000		2.132.000		2.313.000		2.313.000		2.313.000		2.313.000		
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1	1	2.040.000	1	2.132.000	1	2.313.000	1	2.313.000	1	2.313.000	1	2.313.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100	100	817.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian (Persentase)	-	-	-	100	569.156.000	100	1.130.918.000	100	1.156.642.000	100	1.159.305.000	100	1.162.036.000		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.992.493.700		1.178.953.000		2.090.076.700		2.128.690.300		2.168.658.500		2.210.033.200		
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pemberhentian dan evaluasi ASN	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemberhentian dan evaluasi ASN	2	2	675.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN,	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda	-	-	-	939	394.698.000	1039	840.026.000	1039	840.026.000	1089	840.026.000	1089	840.026.000		

uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN)	pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu															
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				673.736.000		393.892.000		838.438.000		838.438.000		838.438.000		838.438.000		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1	1	673.736.000	1	393.892.000	1	838.438.000	1	838.438.000	1	838.438.000	1	838.438.000		
5.03.02.2.01.0007 - Evaluasi Pemberhentian ASN				1.734.000		374.000		1.156.000		1.156.000		1.156.000		1.156.000		
Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1	1	1.734.000	1	374.000	1	1.156.000	1	1.156.000	1	1.156.000	1	1.156.000		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				432.000		432.000		432.000		432.000		432.000		432.000		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				513.591.000		426.580.000		615.485.000		620.619.000		625.881.000		631.275.000		
Terlaksananya pengelolaan mutasi ASN antar daerah daerah dan kenaikan pangkat ASN	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah daerah dan kenaikan pangkat ASN	1	1	111.598.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	980	150.440.000	980	216.800.000	980	219.399.000	980	222.062.000	980	224.793.000		
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				513.591.000		70.690.000		103.950.000		106.549.000		109.212.000		111.943.000		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				111.598.000		79.750.000		112.850.000		112.850.000		112.850.000		112.850.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1	1	111.598.000	1	79.750.000	1	112.850.000	1	112.850.000	1	112.850.000	1	112.850.000		

ASN																
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				983.467.000		1.034.792.000		1.173.082.000		1.246.107.000		1.298.507.000		1.333.495.000		
Terlaksananya pembinaan kedisiplinan	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	100	100	29.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Terkelolanya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, proses izin perceraian pegawai yang dilayani dan hasil evaluasi disiplin ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, proses izin perceraian pegawai yang dilayani dan hasil evaluasi disiplin ASN	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	181	24.018.000	181	74.092.000	181	97.217.000	181	97.217.000	181	97.217.000		
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				29.670.000		16.244.000		27.936.000		27.936.000		27.936.000		27.936.000		
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	1	1	29.670.000	1	16.244.000	1	27.936.000	1	27.936.000	1	27.936.000	1	27.936.000		
Meningkatnya Kualitas Kompetensi Pegawai	Persentase ketepatan waktu menyelesaian pendidikan	100	100	846.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN (Persentase)	-	-	-	100	924.002.000	100	897.389.000	100	922.039.000	100	906.239.000	100	906.239.000		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				975.063.000		999.810.000		985.410.000		1.010.060.000		994.260.000		994.260.000		
Terlaksananya pendidikan lanjutan ASN dan meningkatnya kapasitas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan Lanjutan, ASN yang meningkat kapasitasnya dan ASN yang yang	120	120	846.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-		

	mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan														
Terlaksanananya pengelolaan Assesment center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, hasil koordinasi dankerja sama pelaksanaan Diklat, evaluasi Diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, hasil koordinasi dankerja sama pelaksanaan Diklat, evaluasi Diklat dan sertifikasi jabatan ASN	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	100	924.002.000	100	897.389.000	100	922.039.000	100	906.239.000	100	906.239.000		
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				104.066.000		45.295.000		108.350.000		108.000.000		107.200.000		107.200.000		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	70	70	104.066.000	70	45.295.000	70	108.350.000	70	108.000.000	70	107.200.000	70	107.200.000		
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center				376.600.000		394.367.000		275.000.000		300.000.000		285.000.000		285.000.000		
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1	1	376.600.000	1	394.367.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000		
5.03.02.2.03.0003 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2.315.000		660.000		2.315.000		2.315.000		2.315.000		2.315.000		
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	1	2.315.000	1	660.000	1	2.315.000	1	2.315.000	1	2.315.000	1	2.315.000		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				354.370.000		330.460.000		351.080.000		351.080.000		351.080.000		351.080.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	50	354.370.000	40	330.460.000	40	351.080.000	40	351.080.000	40	351.080.000	40	351.080.000		

5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				4.432.000		1.650.000		4.432.000		4.432.000		4.432.000		4.432.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1	1	4.432.000	1	1.650.000	1	4.432.000	1	4.432.000	1	4.432.000	1	4.432.000		
5.03.02.2.03.0006 - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				1.144.000		150.195.000		153.800.000		153.800.000		153.800.000		153.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	10	10	1.144.000	15	150.195.000	15	153.800.000	15	153.800.000	15	153.800.000	15	153.800.000		
5.03.02.2.03.0007 - Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				4.025.000		1.375.000		2.412.000		2.412.000		2.412.000		2.412.000		
Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)	1	1	4.025.000	1	1.375.000	1	2.412.000	1	2.412.000	1	2.412.000	1	2.412.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan danpengembangan ASN	Persentase JF yang terlayani	100	100	128.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi (Persentase)	-	-	-	100	75.808.000	100	88.021.000	100	88.021.000	100	88.021.000	100	88.021.000		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				975.063.000		999.810.000		985.410.000		1.010.060.000		994.260.000		994.260.000		
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dan pengembangan karir jabatan fungsional ASN	Jumlah dokumen sosialiasasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	2	2	128.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah ASN fungsional yang Dibina dan mendapatkan layanan pengembangan karir	500	500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Meningkatnya pelayanan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	-	-	-	247	75.808.000	322	88.021.000	397	88.021.000	472	88.021.000	472	88.021.000		
5.03.02.2.03.0012 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				35.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Terlaksananya sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	1	1	35.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				15.132.000		13.614.000		15.132.000		15.132.000		15.132.000		15.132.000		
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	100	100	15.132.000	100	13.614.000	100	15.132.000	100	15.132.000	100	15.132.000	100	15.132.000		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				75.010.000		60.742.000		70.576.000		70.576.000		70.576.000		70.576.000		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	400	400	75.010.000	400	60.742.000	400	70.576.000	400	70.576.000	400	70.576.000	400	70.576.000		
5.03.02.2.03.0015 - Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				2.313.000		1.452.000		2.313.000		2.313.000		2.313.000		2.313.000		
Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)	1	1	2.313.000	1	1.452.000	1	2.313.000	1	2.313.000	1	2.313.000	1	2.313.000		
Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengembangan ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	100	100	307.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi (Persentase)	-	-	-	100	205.450.000	100	297.270.000	100	297.270.000	100	297.270.000	100	297.270.000		

5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				513.591.000		426.580.000		615.485.000		620.619.000		625.881.000		631.275.000		
Terlaksananya pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1	1	307.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan manajerial sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya	-	-	-	1	205.450.000	1	297.270.000	1	297.270.000	1	297.270.000	1	297.270.000		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				307.278.000		205.450.000		297.270.000		297.270.000		297.270.000		297.270.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	307.278.000	1	205.450.000	1	297.270.000	1	297.270.000	1	297.270.000	1	297.270.000		
Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengembangan ASN	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	100	100	924.870.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan (Persentase)	-	-	-	100	612.254.000	100	959.579.700	100	988.367.300	100	1.018.018.500	100	1.048.559.200		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.992.493.700		1.178.953.000		2.090.076.700		2.128.690.300		2.168.658.500		2.210.033.200		
Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK	3	3	924.870.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kesesuaian perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	-	-	-	182	612.254.000	152	959.579.700	115	988.367.300	105	1.018.018.500	105	1.048.559.200		
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan				131.540.000		118.900.000		128.544.000		132.400.400		136.372.500		140.463.700		

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	131.540.000	1	118.900.000		128.544.000		132.400.400		136.372.500		140.463.700		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				789.710.700		491.314.000		827.307.100		852.126.400		877.690.200		904.021.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	789.710.700	1	491.314.000	1	827.307.100	1	852.126.400	1	877.690.200	1	904.021.000		
5.03.02.2.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				3.620.000		2.040.000		3.728.600		3.840.500		3.955.800		4.074.500		
Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1	1	3.620.000	1	2.040.000	1	3.728.600	1	3.840.500	1	3.955.800	1	4.074.500		
Kualitas Manajemen Karier Kinerja dan kesejahteraan ASN meningkat	Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	100	100	718.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan (Persentase)	-	-	-	100	439.120.000	100	573.280.000	100	601.871.000	100	631.896.000	100	643.391.000		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.992.493.700		1.178.953.000		2.090.076.700		2.128.690.300		2.168.658.500		2.210.033.200		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	304.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan program lembaga profesi ASN	Persentase efektifitas pelaksanaan program kerja lembaga profesi ASN	-	-	-	100	82.050.000	100	196.520.000	100	206.346.000	100	216.663.000	100	227.497.000		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				304.020.000		82.050.000		196.520.000		206.346.000		216.663.000		227.497.000		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang	1	1	304.020.000	1	82.050.000	1	196.520.000	1	206.346.000	1	216.663.000	1	227.497.000		

	Difasilitasi (Lembaga)															
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				983.467.000		1.034.792.000		1.173.082.000		1.246.107.000		1.298.507.000		1.333.495.000		
Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan tanda jasa aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan tanda jasa aparatur	3	3	414.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya ketepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	-	-	-	100	357.070.000	100	376.760.000	100	395.525.000	100	415.233.000	100	415.894.000		
5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				190.120.000		127.245.000		143.148.000		150.300.000		157.815.000		165.700.000		
Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	2	190.120.000	1	127.245.000	1	143.148.000	1	150.300.000	1	157.815.000	1	165.700.000		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				181.515.000		185.965.000		186.080.000		195.384.000		205.153.000		195.384.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	15	15	181.515.000	15	185.965.000	15	186.080.000	15	195.384.000	15	205.153.000	15	195.384.000		
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				41.880.000		42.980.000		46.172.000		48.481.000		50.905.000		53.450.000		
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	300	300	41.880.000	300	42.980.000	300	46.172.000	300	48.481.000	300	50.905.000	300	53.450.000		
5.03.02.2.04.0006 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1.360.000		880.000		1.360.000		1.360.000		1.360.000		1.360.000		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan	1	1	1.360.000	1	880.000	1	1.360.000	1	1.360.000	1	1.360.000	1	1.360.000		

Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)														
Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian meningkat	Persentase jumlah data ASN yang dikelola	100	100	87.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi (Persentase)	-	-	-	100	89.951.000	100	93.951.000	100	93.951.000	100	93.951.000	100	93.951.000	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.992.493.700		1.178.953.000		2.090.076.700		2.128.690.300		2.168.658.500		2.210.033.200	
Terkelolanya sistem informasi kepegawaian dan evaluasi adata informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan evaluasi adata informasi dan sistem informasi kepegawaian	2	2	87.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya pemanfaatan data yang terintegrasi untuk sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi	-	-	-	2	87.269.000	1	93.951.000	1	93.951.000	1	93.951.000	1	93.951.000	
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				87.269.000		87.269.000		93.519.000		93.519.000		93.519.000		93.519.000	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	87.269.000	1	87.269.000	1	93.519.000	1	93.519.000	1	93.519.000	1	93.519.000	
5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				432.000		432.000		432.000		432.000		432.000		432.000	
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	1	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000	1	432.000	

Kepegawaian	Kepegawaian (Laporan)														
Meningkatnya KualitasPerencanaan dan pengembangan ASN Meningkat	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,38	88,31	94.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah (Persentase)	-	-	-	100	70.690.000	100	101.415.000	100	103.950.000	100	106.549.000	100	109.212.000	
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				513.591.000		426.580.000		615.485.000		620.619.000		625.881.000		631.275.000	
Terkelolanya pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	1	94.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya ASN yang di distribusikan sesuai kebutuhan	Persentase ASN yang di distribusikan	-	-	-	100	70.690.000	100	101.415.000	100	103.950.000	100	106.549.000	100	109.212.000	
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				94.715.000		70.690.000		101.415.000		103.950.000		106.549.000		109.212.000	
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	94.715.000	1	70.690.000	1	101.415.000	1	103.950.000	1	106.549.000	1	109.212.000	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Karier Kinerja dan kesejahteraan ASN	Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai	0.18	2.99	57.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang melanggar disiplin (Persentase)	-	-	-	2,5	36.858.000	2	97.217.000	1,49	97.217.000	1	97.217.000	1	97.217.000	
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				983.467.000		1.034.792.000		1.173.082.000		1.246.107.000		1.298.507.000		1.333.495.000	

Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100	100	57.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terkelolanya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya penegakan dan pembinaan disiplin ASN	Penjumlahan dari ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	-	-	-	138	36.858.000	110	97.217.000	82	97.217.000	55	97.217.000	55	97.217.000		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				27.781.000		13.614.000		69.281.000		69.281.000		69.281.000		69.281.000		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	100		27.781.000	100	13.614.000	100	69.281.000	100	69.281.000	100	69.281.000	100	69.281.000		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				27.936.000		22.870.000		26.780.000		26.780.000		26.780.000		26.780.000		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1	27.936.000	1	22.870.000	1	26.780.000	1	26.780.000	1	26.780.000	1	26.780.000		
5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN				1.734.000		374.000		1.156.000		1.156.000		1.156.000		1.156.000		
Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1	1	1.734.000	1	374.000	1	1.156.000	1	1.156.000	1	1.156.000	1	1.156.000		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.357.326.822		5.332.328.822		5.220.876.000		5.462.275.983		5.610.771.478		5.803.980.637		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.357.326.822		5.332.328.822		5.220.876.000		5.462.275.983		5.610.771.478		5.803.980.637		
Meningkatnya Kualitas kompetensi Pegawai	Persentas kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan	87,95	88.35	6.357.326.822	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

Meningkatnya pengembangan kompetensi	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi (Persentase)	-	-	-	90,2	5.332.328.822	90,6	5.220.876.000	91,29	5.462.275.983	92,16	5.610.771.478	92,16	5.803.980.637	5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				6.357.326.822		5.332.328.822		5.220.876.000		5.462.275.983		5.610.771.478		5.803.980.637		
Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	2	6.357.326.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai tatakala	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai tatakala	3248	3248		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	91.03	5.332.328.822	91.49	5.220.876.000	91.94	5.462.275.983	92.40	5.610.771.478	92.40	5.803.980.637		
5.04.02.2.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan				89.446.000		88.296.000		95.562.000		97.372.000		99.863.000		99.978.000		

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	2	2	89.446.000	3	88.296.000	3	95.562.000	3	97.372.000	3	99.863.000	3	99.978.000		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				6.267.880.822		5.244.032.822		5.125.314.000		5.364.903.983		5.510.908.478		5.704.002.637		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	3.248	3.248	6.267.880.822	5.016	5.244.032.822	5.041	5.125.314.000	5.066	5.364.903.983	5.091	5.510.908.478	5.091	5.704.002.637		

Sumber: SIPD RI BKPSDM Kota Yogyakarta

4.3.3 Kerangka pendanaan urusan keistimewaan 2026-2030

Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan Dana Keistimewaan (Danais) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara khusus kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi DIY.

Kerangka pendanaan urusan keistimewaan DIY 2026–2030 diarahkan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola keistimewaan yang efektif dan berkelanjutan;
2. Mendukung terciptanya masyarakat Yogyakarta yang berbudaya, mandiri, dan lestari;
3. Menjamin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kerangka pendanaan urusan keistimewaan 2026-2030 di tunjukan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Urusan Keistimewaan 2026-2030

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PJ/ PELAKSANA
	Urusan Kelembagaan						
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta	138.423.000	145.344.150	152.265.300	159.186.450	166.107.600	BKPSDM

Sumber: Paniradya DIY

4.3.4 Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, baik dalam bentuk output maupun outcome yang terukur. Subkegiatan ini disusun berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah dan diarahkan untuk menjawab isu-isu pembangunan yang mendesak, penting, serta memiliki dampak bagi masyarakat. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di tunjukan di Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	AKTIVITAS DUKUNGAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(6)
5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1.	a. Program KYOS (KORPRI Yogyakarta Official Store) bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi anggota KORPRI yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. b. Pengembangan Bazar KORPRI (Sembako Murah) kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Bulog c. Program kepemilikan rumah pertama/ rumah investasi	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
2.	a. Redistribusi Tenaga Kesehatan, (Satu Nakes Satu Kampung)		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
				5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
3.	a. Tunjangan kinerja berbasis kinerja individu dan organisasi b. Pengembangan dana pensiun bersama Taspen		Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian	

	yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. c. Fasilitasi JKK dan JKM bagi ASN Kota YogyakartaProgram EOTY (Employee of The Year)			dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
4.	a. Pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan manajerial. b. Digital learning dan e-learning platform (E-Wallet) bagi ASN untuk pelatihan berkelanjutan. c. Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan Core Values Instansi di kurikulum diklat d. Ekosistem belajar bagi Organisasi dan ASN melalui Knowledge Management System	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya pengembangan kompetensi	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
				5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

Sumber: Program prioritas RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029

Berbagai program kesejahteraan ASN yang di fasilitasi BKPSDM Kota Yogyakarta, seperti tunjangan kinerja berbasis capaian individu dan organisasi, pengelolaan dana pensiun bersama Taspen, fasilitasi JKK dan JKM, pengembangan *KYOS (KORPRI Yogyakarta Official Store)* bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi anggota KORPRI yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Program inkubasi ini akan berlangsung selama enam bulan dengan pendampingan intensif agar peserta dapat mencapai tahap implementasi bisnis yang matang. Program ini untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat bagi anggota KORPRI, agar mereka tidak hanya sukses dalam tugas sebagai ASN, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang lebih luas tanpa mengganggu tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN., selain itu Bazar KORPRI (Sembako Murah), program kepemilikan rumah pertama/investasi, serta *Employee of The Year (EOTY)*, pada dasarnya merupakan subkegiatan prioritas yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Melalui program tersebut, penguatan kesejahteraan, motivasi, dan profesionalisme ASN diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi secara menyeluruh, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan Kota Yogyakarta.

Di sisi lain redistribusi pegawai kesehatan (nakes) melalui program Satu Nakes Satu Kampung merupakan salah satu kegiatan/subkegiatan prioritas yang diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat secara merata. Program ini bertujuan mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antarwilayah, memastikan setiap kampung memiliki tenaga kesehatan yang siap memberikan pelayanan dasar, serta meningkatkan aksesibilitas layanan preventif maupun kuratif bagi masyarakat. Dengan demikian, program ini berkontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Pengembangan kapasitas ASN menjadi salah satu subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial secara berkelanjutan, didukung oleh pemanfaatan digital learning dan *e-learning platform* (E-Wallet) agar ASN dapat belajar secara fleksibel dan mandiri. Selain itu, internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta *core values* instansi diintegrasikan ke dalam kurikulum diklat untuk memperkuat karakter dan budaya kerja. Penguatan ekosistem belajar juga diwujudkan melalui penerapan *Knowledge Management System (KMS)* sebagai wadah berbagi pengetahuan, inovasi, dan praktik baik di lingkungan organisasi. Seluruh upaya ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, mempercepat transformasi birokrasi, serta memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Yogyakarta.

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator strategis yang menggambarkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran utama organisasi. IKU merupakan ukuran keberhasilan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada periode 2025–2030 memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. **Indek Sistem Merit.** Pada tahun 2025 target indeks ini berada pada angka 93,78, dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98,98 pada tahun 2029 dan 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN, termasuk rekrutmen, promosi, dan pengembangan kompetensi pegawai.
2. **Nilai Reformasi Birokrasi.** Target nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta yaitu Nilai A sepanjang periode 2025–2030. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan reformasi birokrasi, termasuk efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
3. **Indek Profesionalitas ASN.** Indek ini menunjukkan perkembangan positif yang stabil, menandakan peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN seiring waktu. Meskipun kenaikannya bertahap, tren ini menunjukkan arah yang jelas menuju standar profesionalitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, mendukung efektivitas pelayanan publik dan kualitas manajemen SDM.

Secara keseluruhan, ketiga indikator ini mencerminkan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang profesional dengan semboyan SDM yang literate, kompeten, berakhlak, berkinerja. IKU BKPSDM ditunjukan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	5.03.5.04.4.01.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
2.	Indek Profesionalitas ASN	Indeks	84,17	85	85,25	85,5	85,75	86	86	
3.	Indek Sistem Merit	Indeks	93,78	97,84	98,21	98,44	98,7	98,98	98,98	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	AA	A	A	A	A	A	A	

Sumber : SIPD RI BKPSDM Kota Yogyakarta

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada periode 2025–2030 memiliki beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu:

1. **Rasio Pegawai Fungsional (%).** Rasio ini menunjukkan sedikit peningkatan target dari 22,20% pada 2024 menjadi 23,73% pada 2025, dan mempertahankan target yang ingin di capai hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan kestabilan komposisi pegawai fungsional di lingkungan BKPSDM.
2. **Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%).** Terdapat peningkatan signifikan target rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi dari 36,68% pada 2024 menjadi 54,68% pada 2025, kemudian stabil hingga 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya nyata dalam sertifikasi kompetensi pegawai untuk memastikan standar profesionalisme dan kemampuan teknis yang memadai.
3. **Rasio Pegawai dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%).** Rasio ini mengalami peningkatan bertahap dari 77,15% pada 2024 menjadi 84,7% pada 2030. Target rasio ini menunjukkan pengembangan kualifikasi pendidikan pegawai yang mendukung profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, target Indikator Kinerja Kunci (IKK) di BKPSDM Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan dalam penguatan kompetensi, pendidikan, dan profesionalisme pegawai. Peningkatan signifikan pada rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi menegaskan fokus pada pengembangan kemampuan teknis, sementara kenaikan rasio pendidikan tinggi dan menengah/ dasar mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SDM. Stabilnya rasio pegawai fungsional menunjukkan pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur dan terencana. IKK BKPSDM Kota Yogyakarta ditunjukan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	36.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	
3.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	22.20	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	
4.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	77.15	78.4	79.2	80.2	81.8	83.9	84.7	

Sumber : SIPD BKPSDM Kota Yogyakarta

BAB 5
Penutup

Bab 8 Berisi :

1. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik yang berorientasi pada hasil, dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan kebijakan keistimewaan DIY.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan prioritas, serta indikator kinerja utama dan kinerja kunci yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur. Dokumen ini sekaligus menjadi alat kendali dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

BKPSDM Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjalankan seluruh rencana yang tertuang dalam Renstra ini secara konsisten dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah, instansi vertikal, mitra strategis, maupun masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik akan menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan Renstra dengan dinamika kebutuhan dan tantangan pelayanan publik.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa pelaksanaan Rencana Strategis ini mampu meningkatkan kualitas manajemen ASN serta mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

LAMPIRAN

1.1 POHON KINERJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

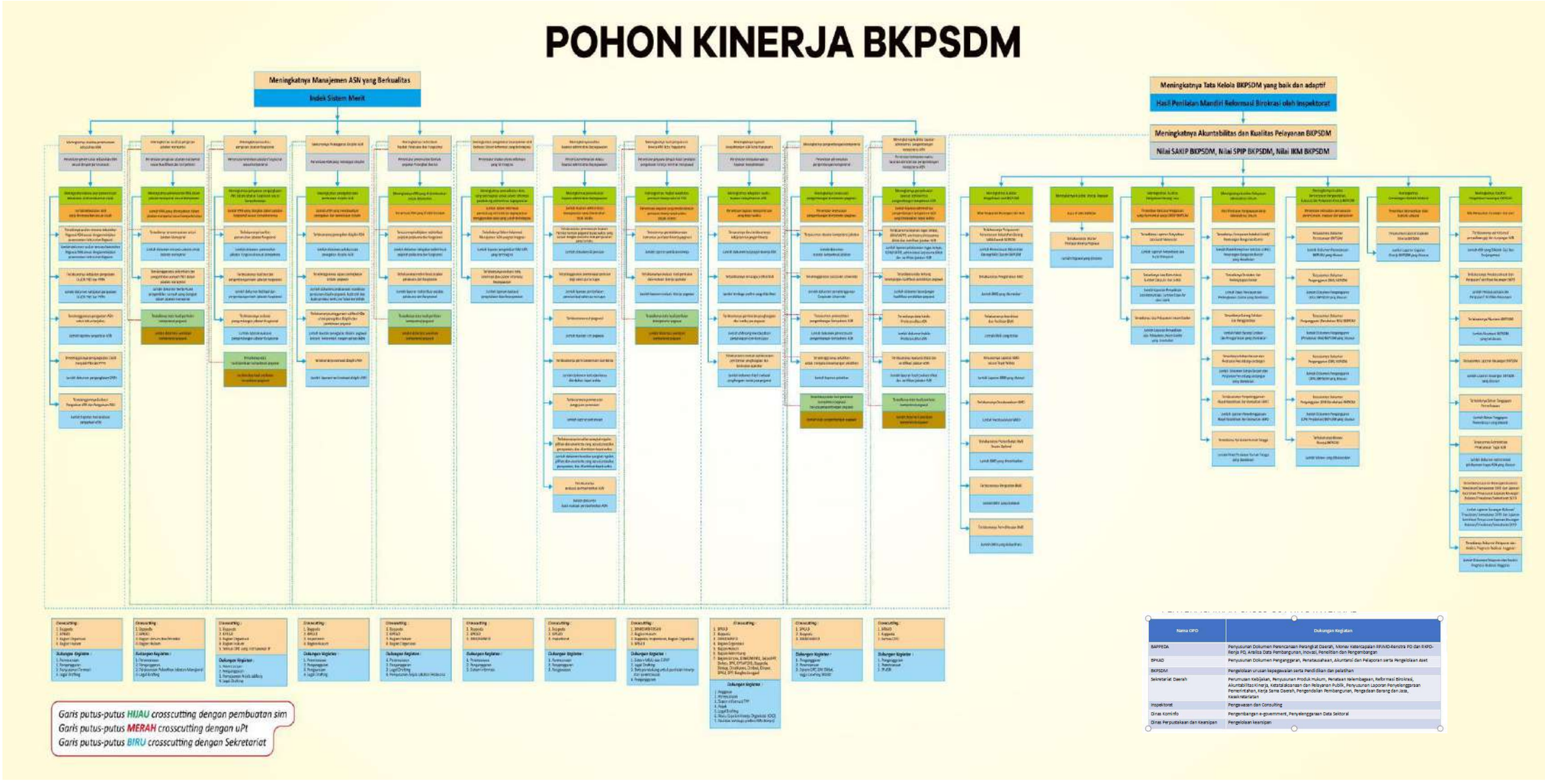

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisis Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Pengelolaan, Pencatatan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

LAMPIRAN 1.2 DATA KINERJA

DATA KINERIA TUIUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
1. Terwujudnya Aparatur Sipil	Indek Profesionalitas ASN	Mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan dan Profesionalitas ASN				Hasil Nilai IP ASN Kota Yogyakarta (N-1)		84,17	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,00	86,00
						Sumber Data									
						Hasil penilaian IP ASN oleh BKN		84,17	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,00	86,00
			1.1. Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	Indek Sistem Merit	Pengukuran yang mengkompilasi berbagai aspek dalam penerapan sistem merit, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, manajemen kinerja, penggajian, dan lain-lain	15 % Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan+12% Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi + 5% Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi + 8 % Ketepatan waktu layanan pemberian tunjangan kinerja +7 % Hasil penilaian pengukuran kinerja pegawai+ 15 %Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian+ 5 %Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi +8 % Jumlah keterpenuhan formasi OPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta + 10% Persentase ASN yang melanggar disiplin+ 5 % Persentase ketepatan waktu layanan administrasi tugas belajar+ 10 % Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi		93,78	97,84	98,21	98,44	98,70	98,98	98,98	98,98
						Sumber data :		93,78	97,84	98,21	98,44	98,70	98,98	98,98	98,98
						1.1.1Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan = Jumlah Pemenuhan kebutuhan ASN dibagi Perencanaan Kebutuhan di kalikan 100%.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.2 Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi= Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi dibagi jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.3 Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi = Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.4 Persentase Ketepatan waktu layanan pemberian tunjangan kinerja = Layanan kesejahteraan sesuai SOP dibagi total layanan kesejahteraan yang di usulkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.5 Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai = Jumlah PNS yang berkinerja minimal kategori menguasai dibagi Jumlah PNS di Kota Yogyakarta	Persen	100,00	90,00	92,00	93,99	96,01	98,01	98,01	98,01
						1.1.6 Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian = Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan layanan kepegawaian dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.7 Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi = Jumlah modul Sistem Informasi yang terintegrasi yang diselesaikan dibagi jumlah modul Sistem Informasi yang direncanakan di integrasikan dikali 100%	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

						1.1.8 Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah = Jumlah exsiting pegawai tiap OPD dibagi jumlah formasi yang tersedia di masing-masing OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.9 Persentase ASN yang melanggar disiplin = Jumlah ASN yang melanggar dibagi Jumlah ASN dikali 100% (Konversi ***)	Persen	99,82	97,01	97,50	98,00	98,51	99,00	99,00	99,00
						1.1.10 Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN = Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI, administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI, administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN dikali 100%	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						1.1.11 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi = Jumlah ASN yang terpenuhi kompetensinya dibagi jumlah ASN di Kota Yogyakarta	Persen	87,95	88,35	90,2	90,6	91,29	92,16	92,16	92,16
			1.2. Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif	**Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk**	**Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat**	**Nilai**	**AA (92,251)**	**A (89,55-90)**	**A (89,65-90)**	**A (89,75-90)**	**A (89,85-90)**	**A (89,95-90)**	**A (89,95-90)**	**A (89,95-90)**
						Sumber Data:									
						Hasil penilaian RB BKPSDM oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPSDM 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset BKPSDM 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN BKPSDM 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	AA (92,251)	A (89,55-92,55)	A (89,65-92,65)	A (89,75-92,75)	A (89,85-92,85)	A (89,95-92,95)	A (89,95-92,95)	A (89,95-92,95)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030
1.1 Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	**1.1.1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	Mengukur pemenuhan kebutuhan ASN Sesuai dengan perencanaan					**Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN dibagi perencanaan kebutuhan dikalikan 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN (PNS dan PPPK)	orang	373	193	182	152	115	105	105	105
									Perencanaan kebutuhan	orang	373	193	182	152	115	105	105	105
					1.1.1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya kesesuaian perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	Mengukur tingkat kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Anjab	**Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab**	**Formasi**	**373**	**193**	**182**	**152**	**115**	**105**	**105**	**105**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan dari perencanaan kebutuhan ASN sesuai anjab	Formasi	373	193	182	152	115	105	105	105
		Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	Mengukur ketepatan waktu layanan kesejahteraan					**Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP dibagi total layanan kesejahteraan yang di usulkan dikalikan 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP	Layanan	50	50	50	50	50	50	50	50
									Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan	Layanan	50	50	50	50	50	50	50	50
					1.1.1.1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya ketepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	Mengukur pemenuhan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu dibagi Total layanan kesejahteraan yang di usulkan dikali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu	Layanan	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
									Total layanan kesejahteraan yang di usulkan	Layanan	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
					1.1.1.2. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan program lembaga profesi ASN	Persentase efektifitas pelaksanaan program kerja lembaga profesi ASN	Mengukur efektifitas program lembaga profesi ASN	**Jumlah program kerja yang terlaksana dibagi Jumlah program kerja yang direncanakan dikali**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Jumlah program kerja yang terlaksana	Prokja	3	3	3	3	3	3	3	3
									Jumlah program kerja yang direncanakan	Prokja	3	3	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	Mengukur modul sistem informasi yang terintegrasi					**Jumlah modul Sistem Informasi**	**Persen**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Jumlah modul Sistem Informasi yang terintegrasi yang diselesaikan	Modul	-	5	2	2	2	2	2	1
									Jumlah modul Sistem Informasi yang direncanakan di integrasikan	Modul	-	5	2	2	2	2	2	1
					1.1.1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya pemanfaatan data yang terintegrasi untuk sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi	Mengukur SIM pendukung administrasi kepegawaian terintegrasi	**Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi**	**SIM**	**-**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi	SIM	-	3	2	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	Mengukur layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu					**Jumlah layanan administrasi**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	2.079	2.079	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250	2.250
									Jumlah pengajuan layanan kepegawaian	Layanan	2.079	2.079	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250	2.250
					1.1.1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal,	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu	Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah layanan administrasi**	**Layanan**	**918**	**918**	**939**	**1039**	**1039**	**1089**	**1089**	**1089**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	918	918	939	1039	1039	1089	1089	1089

					1.1.1.3. Mutasi dan Promosi	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu	Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu**	**Layanan**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
									Sumber Data:										
									Penjumlahan layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	980	980	980	980	980	980	980	980
					1.1.1.2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu**	**Layanan**	**181**	**181**	**181**	**181**	**181**	**181**	**181**	**181**
									Sumber Data:										
									Penjumlahan layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	181	181	181	181	181	181	181	181
		Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	Mengukur pemerataan redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional					**Jumlah exsiting pegawai tiap OPD dibagi jumlah formasi yang tersedia di masing-masing OPD dikali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									Jumlah exsiting pegawai tiap OPD	ASN	235	298	323	388	408	478	478	478
									Jumlah formasi yang tersedia di masing-masing OPD	ASN	235	298	323	388	408	478	478	478
					1.1.1.3. Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya ASN yang di distribusikan sesuai kebutuhan	Persentase ASN yang di distribusikan	Mengukur pemenuhan pegawai dalam jabatan fungsional dan pelaksana	**Jumlah realisasi distribusi ASN dibagi jumlah ASN pejabat pelaksana + pejabat fungsional di kali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Realisasi distribusi ASN	ASN	298	298	323	388	408	478	478	478
									Jumlah ASN pejabat pelaksana + pejabat fungsional.	ASN	298	298	323	388	408	478	478	478
		Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	Mengukur capaian keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi					**Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi dibagi jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	**PNS**	35	44	94	135	174	219	219	219
									Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata	PNS	35	44	94	135	174	219	219	219
					1.1.1.3. Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan manajerial sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya	Mengukur pemenuhan PNS Jabatan manajerial sesuai kompetensinya terhadap PNS yang akan ditata	**Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya**	**Jumlah**	**35**	**44**	**94**	**135**	**174**	**219**	**219**	**219**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya	PNS	35	44	94	135	174	219	219	219
		Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	Mengukur capaian keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi					**Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	PNS	172	172	247	322	397	472	472	472
									Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata	PNS	172	172	247	322	397	472	472	472
					1.1.1.4. Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya pelayanan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Mengukur pemenuhan PNS Jabatan Fungsional sesuai kompetensinya terhadap PNS yang akan ditata	**Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya**	**Jumlah**	**172**	**172**	**247**	**322**	**397**	**472**	**472**	**472**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	**PNS**	172	172	247	322	397	472	472	472
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Mengukur ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi terhadap pengajuan layanan					**Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI di kali 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

									Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	85	85	90	90	92	92	92	92
									Jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI	Layanan	85	85	90	90	92	92	92	92
					1.1.1.4. Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Mengukur tingkat layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang dapat diselesaikan tepat waktu	**Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu**	**Jumlah**	**85**	**85**	**90**	**90**	**92**	**92**	**92**	**92**
									Sumber Data:									
									Penjumlahan dari layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	85	85	90	90	92	92	92	92
		Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	Mengukur Penilaian kinerja pegawai yang minimal mengusai					**Jumlah PNS yang berkinerja minimal kategori menguasai dibagi Jumlah PNS di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**Persen**	**99,45**	**90,00**	**92,00**	**93,99**	**96,01**	**98,01**	**98,01**	**98,01**
									Sumber Data:		99,45%	90,00%	92,00%	93,99%	96,01%	98,01%	98,01%	98,01%
									Jumlah PNS yang berkinerja minimal kategori menguasai	PNS	4683	4.195	4.104	4.005	3.899	3.784	3.784	3.784
									Jumlah PNS di Kota Yogyakarta	PNS	4709	4.661	4.461	4.261	4.061	3.861	3.861	3.861
					1.1.1.2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya tingkat kesadaran penilaian kinerja seluruh PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	Mengukur penilaian kinerja pegawai yang tepat waktu dalam sistem penilaian kinerja pegawai	**Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem dibagi total pegawai di kali 100%**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
									Sumber Data:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem	ASN	4.661	4.661	4.461	4.261	4.061	3.861	3.861	3.861
									Total pegawai	ASN	4.661	4.661	4.461	4.261	4.061	3.861	3.861	3.861
		Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang melanggar disiplin	Mengukur tingkat pembinaan disiplin ASN					**Jumlah ASN yang melanggar dibagi Jumlah ASN dikali 100% (Konversi****)**	**Persen**	**99,82**	**97,01**	**97,50**	**98,00**	**98,51**	**99,00**	**99,00**	**99,00**
									Jumlah ASN yang melanggar dibagi Jumlah ASN dikali 100%	**Persen**	**0,18**	**2,99**	**2,50**	**2,00**	**1,49**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
									Sumber Data:		0,18%	2,99%	2,50%	2,00%	1,49%	1,00%	1,00%	1,00%
									Jumlah ASN yang melanggar	ASN	10	165	138	110	82	55	55	55
									Jumlah ASN	ASN	5535	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
					1.1.1.2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya penegakan dan pembinaan disiplin ASN	Penjumlahan dari ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	Mengukur tingkat kepatuhan terhadap kedisiplinan ASN dan pembinaannya	Jumlah ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	ASN	10	165	138	110	82	55	55	55
									Sumber Data:									
									Penjumlahan ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	ASN	10	165	138	110	82	55	55	55
	1.1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya pengembangan kompetensi	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	Mengukur tingkat terpenuhinya kompetensi ASN terhadap jumlah ASN					**Jumlah ASN yang terpenuhi kompetensinya dibagi jumlah ASN di Kota Yogyakarta x 100%**	**Persen**	**87,95**	**88,35**	**90,20**	**90,60**	**91,29**	**92,16**	**92,16**	**92,16**
									Sumber Data:		**87,95%**	**88,35%**	**90,20%**	**90,60%**	**91,29%**	**92,16%**	**92,16%**	**92,16%**
									Jumlah ASN yang terpenuhi kompetensinya	ASN	4.868	4.868	4.970	4.992	5.030	5.078	5.078	5.078
									Jumlah ASN di Kota Yogyakarta	ASN	5535	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
					1.1.2.1.Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	Mengukur kesesuaian pengembangan kompetensi ASN Kota Yogyakarta yang disyaratkan dalam anjab	**Pengembangan kompetensi yang telah diikuti dibagi Pengembangan kompetensi yang disyaratkan dalam anjab di kali 100%**	**Persen**	**90,58**	**90,58**	**91,03**	**91,49**	**91,94**	**92,40**	**92,40**	**92,40**
									Sumber Data:		90,58%	90,58%	91,03%	91,49%	91,94%	92,40%	92,40%	92,40%
									Pengembangan kompetensi yang telah diikuti	ASN	4.991	4.991	5.016	5.041	5.066	5.091	5.091	5.091
									Pengembangan kompetensi yang disyaratkan dalam anjab	ASN	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Meningkatnya pemahaman ASN tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta**	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan Di Pemerintah Kota Yogyakarta	Mengukur efektivitas upaya internalisasi nilai-nilai keistimewaan DIY kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.					Jumlah pegawai yang mengalami peningkatan pemahaman dibagi Jumlah pegawai yang mengikuti pengukuran pemahaman x 100%	Persen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
									Sumber Data:									
									Jumlah pegawai yang mengalami peningkatan pemahaman	ASN	30	30	30	30	30	30	30	30
									Jumlah pegawai yang mengikuti pengukuran pemahaman	ASN	30	30	30	30	30	30	30	30
					1.1.1.1. Peningkatan budaya pemerintah	Meningkatnya jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi	Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Mengukur jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	ASN	30	30	30	30	30	30	30	30
									Sumber Data:									

									Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	ASN	30	30	30	30	30	30	30	30
1.2 Meningkatnya Tata Kelola BKPSDM yang baik dan adaptif	**1.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM**	Nilai SAKIP BKPSDM	"mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50)					**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai**	**A (89,01)**	**A (89,05)**	**A (89,07)**	**A (89,09)**	**A (89,11)**	**A (89,13)**	**A (89,15)**	**A (89,17)**
									Sumber Data:									
									Hasil Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (89,01)	A (89,05)	A (89,07)	A (89,09)	A (89,11)	A (89,13)	A (89,15)	A (89,17)
			Nilai SPIP BKPSDM	Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50					**Hasil Penilaian SPIP oleh Inspektorat**	**Nilai**	**Terkelola dan Terukur (4,666)**	**Terkelola dan Terukur (4,507-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,508-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,509-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,510-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)**	**Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)**
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat Nilai maturitas SPIP BKPSDM: 1. Penetapan tujuan 2. Struktur & proses 3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,666)	Terkelola dan Terukur (4,507-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,508-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,509-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,510-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)	Terkelola dan Terukur (4,511-4,70)
			Nilai IKM BKPSDM	Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup BKPSDM					**Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**93.03**	**93.10**	**93.20**	**93.40**	**93.50**	**93.60**	**93.70**	**93.80**
									Sumber Data :									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93.03	93.10	93.20	93.40	93.50	93.60	93.70	93.80
					1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BKPSDM	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM	Mengukur tingkat ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM	**Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM yang wajib disusun x 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data :		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah Dokumen perencanaan,	Dokumen	9	9	9	9	9	9	9	9
									Jumlah Dokumen perencanaan,	Dokumen	9	9	9	9	9	9	9	9
							Persentase ketersediaan data statistik sectoral BKPSDM	Mengukur tingkat ketersediaan data statistik sektoral BKPSDM	**Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data :		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah Data statistik yang disediakan	Data	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah Data statistik sektoral	Data	1	1	1	1	1	1	1	1
					1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD**	**Nilai**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD**	**Nilai**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD**	**Nilai**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD**	**Nilai**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset BKPSDM oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5

					1.2.1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM	Mengukur kesesuaian pelaksanaan pengelolaan arsip dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan instrumen seperti Penilaian Sistem Kearsipan Internal (ASKI) di BKPSDM	**Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum**	**Nilai**	**74,7**	**74,8**	**74,9**	**75,0**	**75,1**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
									Sumber Data :										
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,2	75,2	75,2
					1.2.1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BKPSDM	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Mengukur kualitas ASN secara keseluruhan berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya di BKPSDM Kota Yogyakarta	Hasil nilai IP ASN BKPSDM	Nilai	**90,80**	**87,82-90,82**	**87,84-90,84**	**87,86-90,86**	**87,88-90,88**	**88,00-91,00**	**88,00-91,00**	**88,00-91,00**
									Sumber Data :										
									Hasil nilai IP ASN BKPSDM	Nilai	90,80	87,82-90,82	87,84-90,84	87,86-90,86	87,88-90,88	88,00-91,00	88,00-91,00	88,00-91,00
					1.2.1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM	Mengukur presentase Rencana Pengadaan di Sistem Rencana Umum Pengadaan BKPSDM Kota Yogyakarta di LPSE	Jumlah belanja BKPSDM yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA BKPSDM dikali 100%	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data :										
									Jumlah belanja BKPSDM yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	100	100	100	100	100	100	100	100
									Jumlah belanja pada DPA BKPSDM	Rupiah	100	100	100	100	100	100	100	100

CASCADING BKPSDM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa dijelaskan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang Ditanhil dari Kegaan OBO	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/OSP pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/OSP pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator progress	Tulis Nama Bidang Yang mengampu Indikator program	Target						Tulis Nama Kegiatan yang ditanhil dari Kegaan OBO	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator kegiatan	Target						Tulis Nama Subkegiatan yang ditanhil dari Kegaan OBO	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Sekai/Kaisa Tim Kerja Yang mengampu Indikator subkegiatan	Target					
1	**BKPSDM KOTA YOGYAKARTA**	**Terwujudnya Aparatur BigE Kegan yang Berkualitas**	**Indek Profesionalitas Pegawai**	**Hasil Nilai IP ASN Kota Yogyakarta (X-1)**	85	85,25	85,5	85,75	86	86	**Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas**	**Indek Sistem Merit**	**15 % Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan+12% Persentase ketersian jabatan manajerial sesuai kompetensi + 8% Persentase ketersian jabatan fungsional sesuai kompetensi + 8 % Ketepatan waktu layanan pemberian tunjangan kinerja +7 % Hasil penilian pengelolaan kinerja pegawai+ 15 %Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian+ 5 %Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi +8 % Jumlah keterpenuhan formasi OPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta + 10% Persentase ASN yang melanggar disiplin+ 5 % Persentase ketepatan waktu layanan administrasi tugas belajar 10 % Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi Persentase ketersian jabatan manajerial sesuai kompetensi + Persentase ketersian jabatan fungsional sesuai kompetensi + Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengna perencanaan + Persentase ASN yang melanggar disiplin + Jumlah keterpenuhan formasi OPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta + Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi + Hasil penilaian pengelolaan kinerja pegawai + Ketepatan waktu layanan pemberian tunjangan kinerja + Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi + Persentase ketepatan waktu layanan administrasi tugas belajar+Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian**	97,94	98,21	98,44	98,70	98,98	98,98	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN dibagi perencanaan kebutuhan dikalikan 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Meningkatnya ketersediaan perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	Penjumlahan dari perencanaan kebutuhan ASN sesuai anjab	**Kepala Bidang PP**	373	193	182	172	115	105	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersedianya usulan rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai	Jumlah dokumen usulan rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan pengadaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN dibagi perencanaan kebutuhan dikalikan 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Meningkatnya ketersediaan perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	Penjumlahan dari perencanaan kebutuhan ASN sesuai anjab	**Kepala Bidang PP**	373	193	182	172	115	105	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersesainya rekomendasi pengadaan CALON PNS dan PPPK	Jumlah dokumen rekomendasi pengadaan CALON PNS dan PPPK	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan pengadaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN dibagi perencanaan kebutuhan dikalikan 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Meningkatnya ketersediaan perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	Penjumlahan dari perencanaan kebutuhan ASN sesuai anjab	**Kepala Bidang PP**	373	193	182	172	115	105	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terseleng garanya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan pengadaan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensinya dibagi jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	150	100	100	100	**Mutasi dan Promosi ASN**	Meningkatnya ketersediaan PNS dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penjumlahan dari perencanaan kebutuhan ASN sesuai anjab	**Kepala Bidang PP**	44	94	138	174	219	219	Pengelolaan Promosi ASN	Terseleng garanya pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dalam jabatan manajerial	Jumlah dokumen Berita Acara pengambilan sumpah yang dilengkapi dalam jabatan manajerial	Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir JPT dan Jabatan Administrator	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase ketersian jabatan fungsional sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Meningkatnya pelayanan pengadaptasian PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Penjumlahan dari PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	**Kepala Bidang PP**	172	247	322	397	472	472	Koordinasi dan Penyeleksian Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen fasilitasi dan pengembangan karir jabatan fungsional	Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase kesesuaian jabatan fungsional sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Meningkatnya pelayanan pengadaptasian PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Penjumlahan dari PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	**Kepala Bidang PP**	172	247	322	397	472	472	Penilaian Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya kualitas penyesuaian jabatan fungsional	Jumlah dokumen penyesuaian jabatan fungsional	Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase kesesuaian jabatan fungsional sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Meningkatnya pelayanan pengadaptasian PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Penjumlahan dari PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	**Kepala Bidang PP**	172	247	322	397	472	472	Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen fasilitasi dan pengembangan karir jabatan fungsional	Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase kesesuaian jabatan fungsional sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya dibagi Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata dikali 100%	**Kepala Bidang PP**	100	100	100	100	100	100	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Meningkatnya pelayanan pengadaptasian PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Penjumlahan dari PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	**Kepala Bidang PP**	172	247	322	397	472	472	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Jumlah laporan evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan	Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP di bagi Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan dikali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100	100	100	100	100	100	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan program bintaga profesi ASN	Persentase sikilitas pelaksanaan program bintaga profesi ASN	Jumlah program kerja yang terlaksana dibagi jumlah program kerja yang direncanakan	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan	Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP di bagi Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan dikali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100	100	100	100	100	100	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Meningkatnya kesepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu dibagi Total layanan kesejahteraan yang di usulkan	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersesainya dan terlaksananya kebijakan tunjangan kinerja	Jumlah dokumen kebijakan kinerja ASN	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	Jumlah PNS yang berkinerja minimal Kategori menguasai dibagi Jumlah PNS di Kota Yogyakarta	90	92	93,99	96,01	98,01	98,01	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Meningkatnya tingkat kesediaan penilaian kinerja sesuai PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem dibagi total pegawai kali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersesainya pelaksanaan instrumen penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai	Ketua Tim Kerja Manajemen Karir dan Kinerja	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	Jumlah PNS yang berkinerja minimal Kategori menguasai dibagi Jumlah PNS di Kota Yogyakarta	90	92	93,99	96,01	98,01	98,01	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Meningkatnya tingkat kesediaan penilaian kinerja sesuai PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem dibagi total pegawai kali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah laporan evaluasi kinerja pegawai	Ketua Tim Kerja Manajemen Karir dan Kinerja	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan	Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP di bagi Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan dikali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100	100	100	100	100	100	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Meningkatnya kesepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu dibagi Total layanan kesejahteraan yang di usulkan	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terfasilitasinya lembaga profesi, penghargaan dan tanda jasa yang di lasilitasi	Jumlah lembaga profesi, penghargaan dan tanda jasa yang di lasilitasi	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan	Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP di bagi Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan dikali 100%	**Kepala Bidang MKS**	100	100	100	100	100	100	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Meningkatnya kesepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu dibagi Total layanan kesejahteraan yang di usulkan	**Kepala Bidang MKS**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi penghargaan tanda jasa pegawai	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
																				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah pengajuan layanan kepegawaian dikali 100%	**Kepala Bidang AK**	100	100	100	100	100	100	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian AMB**	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Penjumlahan dari layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	**Kepala Bidang AK**	2079	2079	2100	2150	2300	2250	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terseleng garanya pemberian pensiun bagi calon purna tugas	Jumlah laporan pemberian pensiun	Ketua Tim Kerja Pemberian dan Pemberhentia n	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

BKPSDM
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

"Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"

"Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif"

INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Kenari 51 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682, 371977
Laman inspektorat.jogjakota.go.id; Pos-el inspektorat@jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Renstra ini merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan penyusunan Renstra berdasarkan RPJPD Kota Yogyakarta tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahunan).

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf, dan stakeholder Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, selain itu Dokumen Renstra ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam 5 tahun kedepan.

Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya *good governance* (Pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Inspektur,

PARIS PAULINA ANDRIANI, SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19[illegible]71995082002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud Dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 6
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktural 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 7
2.2.1 Sumber Daya Manusia 7
2.2.2 Keadaan Sarana Dan Prasarana 9
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.4 Kelompok Sasaran Layanan 31
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 31
2.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 31
2.7 Isu Strategis Perangkat Daerah 32

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan 35
3.1 Visi Dan Misi RPJMD 2025-2029 35
3.2 Tujuan Dan Sasaran 35
3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra 37
3.4 Penahapan Renstra 39
3.5 Perumusan Arah Kebijakan Renstra 42
3.6 Keterlibatan Perangkat Daerah Lain (*Croscutting)* 42

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 43
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja 44
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan 53
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 65
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) 67
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 69

Bab V Penutup 71

Lampiran
1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Tabel Data Kinerja 2025-2029

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat Dan Golongan Per 1 Agustus 2025	8
Tabel 2.2	Jumlah Naban Dan Tenaga Teknis Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025	9
Tabel 2.4	Bezeting Dibanding Formasi Tahun 2025	9
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin Tahun 2025	9
Tabel 2.6	Profil Sarana Dan Prasarana	10
Tabel 2.7	Matriks Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	12
Tabel 2.8	Matriks Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyaarta Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.9	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
Tabel 3.1	Matriks Penjabaran Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Daerah	36
Tabel 3.2	Teknis Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra	37
Tabel 3.3	Strategi dan Penahapan Renstra	40
Tabel 3.4	Perumusan Arah Kebijakan Renstra	42
Tabel 3.5	*Croscutting* Eksternal dan Internal	42
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pada Pemerintah Kota Yogyakarta	45
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta	54
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta	66
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	68
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumebr daya yang tersedia. Dalam konteks Pembangunan daerah, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya inilah yang harus diatasi dengan membuat perencanaan Pembangunan agar pilihan Tindakan yang dilaksanakan dapat menyelesaian permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan senyampang dengan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara simultan dan terkoordinir.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi landasan untama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang Perangkat Daerah dipastikan terukur, sisetmatis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyusunan Renstra 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Adapun Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 10).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek pengawasan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran strategis dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Selain itu sebagai pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 2025-2029
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Inspektorat Daerah Daerah Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 5 tahun
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan
6. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang;
Dasar Hukum Penyusunan;
Maksud dan Tujuan;
Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah 2025-2029;
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program;

Uraian Kegiatan;

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV PENUTUP

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTURAL

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah dan Badan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, FUngsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2.2. Sub Bagian Keuangan; dan
   2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

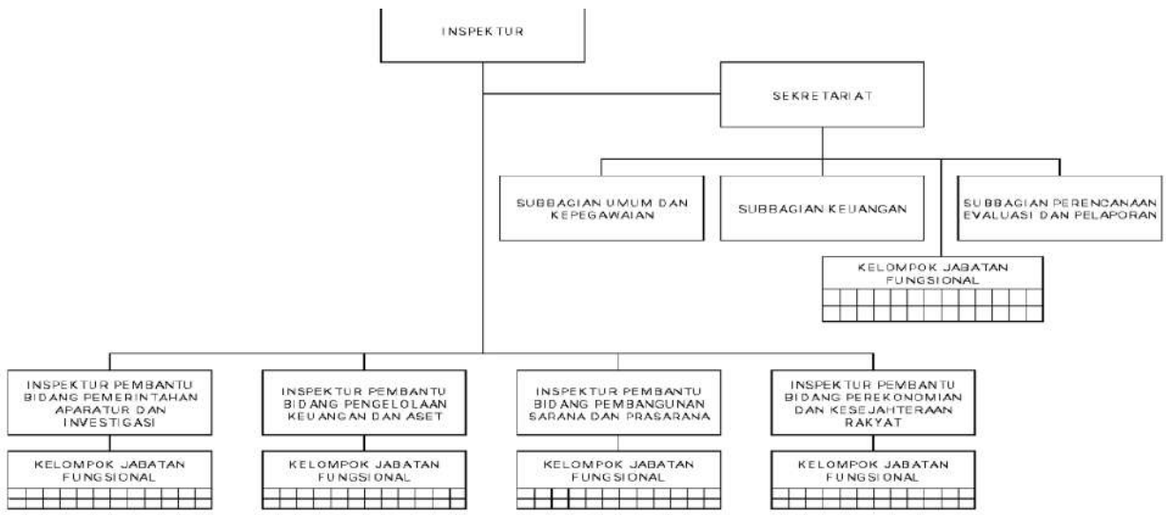

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta memiliki tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan emerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi unit organisasi Inspektorat Daerah adalah :

1. Inspektur, mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat dengan dibantu oleh 3 orang Kasubbag, yaitu :
    a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Inspektorat;
    b. Kasubbag Keuangan, yang bertugas melaksanakan perenanaan, pengoragnisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Inspektorat; dan
    c. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi.
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa

jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah yang dituangkan pada Kepwal Anjab Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah idealnya adalah 96 orang, jumlah pegawai yang ada 76 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 20 orang atau 20,83 %. Jumlah personil yang ada per 1 Agustus 2025 berdasarkan keterisian hasil Analisa Jabatan PNS sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Per 1 Agustus 2025

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	: Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	1 orang
Sekretaris	: Pembina Tk I, Gol. IV/b	1 orang
Inspektur Pembantu	: Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	1 orang
	: Pembina, Gol. IV/b	3 orang
Kepala Sub Bagian	: Pembina, Gol. IV/a	1 orang
	: Penata TK I, Gol. III/d	2 orang
Auditor Madya	: Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	- orang
	: Pembina Tk. I, Gol. IV/b	2 orang
	: Pembina, Gol. IV/a	4 orang
	: Penata Tk. I, Gol, III/d	- orang
Auditor Muda	: Penata Tk. I, Gol. III/d	5 orang
	: Penata, Gol. III/c	5 orang
	: Penata Muda Tk I, III/b	- orang
Auditor Pertama	: Penata Muda Tk.I, Gol. III/b	8 orang
	: Penata Muda, Gol. III/a	7 orang
Auditor Pelaksana Lanjutan	: Penata Muda Tk.I, Gol. III/b	1 orang
Auditor Pelaksana	: Penata Muda, Gol. III/a	1 orang
P2UPD Muda	: Penata Tk. I, Gol. III/d	1 orang
P2 UPD Pertama	: Penata Muda, Gol. III/a	4 orang
Auditor Pelaksana	: Pengatur, Gol. II/c	7 orang
	: Pengatur Tk. I, Gol II/d	10 orang
Pranata Komputer Terampil	: Pengatur, Gol. II/c	1 orang
Fungsional Umum	: Penata Tk. I, Gol. III/d	2 orang
	: Penata, Gol. III/c	1 orang
	: Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	2 orang
	; Penata Muda, Gol. III/a	- orang
	: Pengatur Tk. I, Gol. II/d	3 orang
	: Pengatur, Gol. II/c	3 orang
	: Pengatur Muda TK I/Gol. II b	- Orang
	TOTAL	**76 orang**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat Daerah juga dibantu oleh 3 personil Non ASN dengan komposisi 1 orang Naban (Tenaga bantu) dan 2 orang Tenaga Teknis untuk melaksanakan ketugasan di Sekretariat sebagaimana tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 2.2. Jumlah Naban dan Tenaga Teknis Tahun 2025

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PENEMPATAN
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP)	1 orang	Subbag Umum & Kepegawaian
	2 orang	1 orang pada Subbag Umum & Kepegawaian dan 1 orang pada Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1	S2	: 6 orang
2	S1	: 42 orang
3	D3	: 24 orang
4	SMA/SMK	: 4 orang
5	SLTP	: 0 orang
6	SD	: 0 Orang
TOTAL		**76 Orang**

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu institusi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumlah SDM (bezeting) menjadi kekuatan institusi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan bezeting di Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Bezeting dibanding Formasi Tahun 2025

No.	Jabatan	Formasi	Bezeting	Prosentase
1.	Struktural	9	9	100 %
2.	Auditor	56	50	89 %
3.	P2UPD	5	5	100 %
4.	Pranata Komputer	1	1	100 %
5.	Fungsional Umum	25	11	44 %
	Jumlah	**96**	**76**	**79 %**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat Daerah **BELUM MEMENUHI** jumlah pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin Tahun 2025

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural	7	2
2	Fungsional Tertentu	38	18
3	Fungsional Umum	8	3
	Jumlah	**53**	**23**

2.2.2 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini

sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta menempati gedung di Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta dengan luas tanah 730m2 terdiri dari 1 gedung 4 tingkat seluas 1.176m2.

Dengan berjalannya waktu dimana urgensitas ketugasan semakin meningkat dan bertambahnya jumlah pegawai, maka gedung Inspektorat Daerah menjadi kurang memadai. Dalam hal ini ruang kerja untuk menampung seluruh pegawai menjadi kurang memadai, serta keterbatasan ruang rapat dimana frekuensi rapat koordinasi di Inspektorat Daerah tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri.

Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut

Tabel 2.6. Profil Sarana dan Prasarana Per 1 Agustus 2025

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ideal
1	Kendaraan Roda 2	10 unit	13 unit
2	Kendaraan Roda 4	6 unit	6 unit
3	Handycam	-	2 buah
4	LCD Proyektor	6 buah	6 buah
5	Camera digital	4 buah	4 buah
6	Rollmeter	4 buah	4 buah
7	Scanner	12 buah	12 buah
8	Komputer	23 buah	25 buah
9	Printer	10 buah	24 buah
10	Laptop	30 buah	33 buah
11	Pengukur ketebalan besi	2 buah	3 buah
12	Checker penghitung	2 buah	2 buah
13	Pengukur Test beton	2 buah	4 buah
14	Telephone PABX LG	1 buah	2 buah
15	Meteran Laser	4 buah	4 buah
16	Telephone SLJJ world phone	1 buah	1 buah
17	Mesin Penghancur Kertas	7 buah	6 buah
18	Tablet	-	1 buah
19	Voice recorder	5 buah	5 buah
20	Whiteboard 2 muka	-	6 buah
21	Wireles	-	2 buah
22	Air Purifyer	-	-
23	Meja kubikal	48 buah	48 buah
24	Kursi kerja	91 buah	91 buah
25	TV	12 buah	12 buah
26	Scaner portable	5 buah	5 buah
27	Genset	1 buah	1 buah
28	Air Conditioner (AC)	29 buah	29 buah
29	CCTV	4 buah	4 buah
30	Kamera Conference	1 buah	1 buah

2.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selama 5 tahun terakhir (2020 – 2025 Semester I) mengalami perubahan indikator kinerja utama, yaitu pada Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026, serta perubahan indikator kinerja program pada kedua masa Renstra tersebut.

Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir dalam rentang pertengahan Resntra 2017-2022 dan Resntra 2023-2026 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Matriks Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Rentang Tahun n					Realisasi Renstra Rentang Tahun n					Prosentase Capaian Renstra Rentang Tahun n				
		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA																
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Meningkat	3,40	3,40	3,40			3,00	3,20	2,89 (*)			88,23%	94,11%	85%		
2	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)				Level 3	Level 3				Level 3	Level 3				Tercapai	Tercapai
3	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah				Nilai A	Nilai A				Nilai AA	Nilai AA				Tercapai	Tercapai
INDIKATOR KINERJA PROGRAM																
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
1.1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah untuk Inspektorat Daerah Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Rentang Tahun n					Realisasi Renstra Rentang Tahun n					Prosentase Capaian Renstra Rentang Tahun n				
		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**															
2.1	Prosentase Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	91%	91%	91%			100%	100%	100%			109,89%	109,89%	109,89 %		
2.2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	91%	91%	91%			88,24 %	100%	100%			96,96%	96,96%	96,96%		
2.3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	91%	91%	91%			100%	100%	100%			109,89%	109,89%	109,89 %		
2.4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	91%	91%			100%	100%	100%			109,89%	109,89%	109,89 %		
2.5	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87%	89%	91%			98,39 %	100%	100%			113,09%	112,35%	109,89 %		
2.6	Persentase Rekomendasi Hasil				95%	95,2%				100%	100%				105,26%	105,04%

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Rentang Tahun n					Realisasi Renstra Rentang Tahun n					Prosentase Capaian Renstra Rentang Tahun n				
		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi															
2.7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset				95%	95,2				100%	100%				105,26%	105,04%
2.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana				95%	95,2				90,90%	100%				105,26%	105,04%
2.9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat				95%	95,2				100%	100%				105,26%	105,04%
2.11	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal				91 %	94,74%				100%	100%				109,89%	105,55%

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Rentang Tahun n					Realisasi Renstra Rentang Tahun n					Prosentase Capaian Renstra Rentang Tahun n				
		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**															
3.1	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)			level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)			level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	Tercapai	Tercapai		
3.2	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi				18,18 %	27,27 %					63,64% 30,77%				169,25% 4%	233,70%
3.3	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset				20%	50%				90,91%	70%				454,55%	140%
3.4	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana				18,18 %	36,36 %				41,67%	45,45%				229,20%	125%
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan				40%	50%				53,85%	45,45%				134,62%	90,9%

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Rentang Tahun n					Realisasi Renstra Rentang Tahun n					Prosentase Capaian Renstra Rentang Tahun n				
		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026		Renstra 2017-2022			Renstra 2023-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat															

Ket (*) Penurunan nilai Maturitas SPIP tahun 2022 dikarenakan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Walikota Yogyakarta periode 2017-2022 atas kasus dugaan korupsi perizinan pendirian salah satu bangunan di Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas untuk kinerja dengan menggunakan target Renstra 2017-2022 di tahun 2020 s.d 2022 untuk indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah (IKU) yaitu "Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Meningkat" tidak tercapai dikarenakan terdapat beberapa hal dari nilai parameter di SPIP yang belum dapat penuhi dan di tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sehingga menurunkan nilai Maturitas SPIP. Namun, nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan di tahun berikutnya dengan menggunakan Renstra 2023-2026, hanya saja pada tahun perencanaan tersebut IKU Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak menggunakan nilai Maturitas SPIP. Untuk indikator sasaran program pada Renstra 2017-2022 pada tahun 2020 s.d 2022 seluruhnya telah tercapai di tiga program.

Untuk kinerja Inspektorat Daerah dengan menggunakan dasar Renstra 2023-2026 untuk rentang waktu tahun 2023 s.d 2025 (semester I) telah tercapai seluruhnya baik pada sasaran kinerja IKU dan sasaran program, hanya saja pada tahun 2023 terdapat 1 indikator sasaran program yang tidak tercapai yaitu "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana". Ketidaktercapaian dikarenakan Perangkat Daerah terkait yang harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan masih menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan membutuhkan waktu penyelesaian. Di tahun 2024 indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana" tercapai sesuai target.

Untuk realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah dimana diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2021 mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan baik target keuangan beserta realisasinya tertuang pada matriks berikut :

Tabel 2.8. Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyaarta Tahun 2020-2025 (Semester I)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
INSPEKTORAT DAERAH	**4.971.074.436,-**	**10.352.892.475,-**	**12.805.355.980,-**	**14.176.851.160,-**	**15.515.906.950,-**	**4.954.143.479,-**	**9.625.091.855,-**	**11.767.156.139,-**	**13.033.829.815,-**	**14.584.958.569,-**	**99,65 %**	**92,97%**	**91,89%**	**91,93%**	**94,00%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.172.025.000,-**					**4.172.025.000,-**					**99%**				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**799.049.436,-**					**782.118.479,74**					**97,88 %**				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	443.184.952,-					434.457.255,74					98,03 %				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.289.500,-					73.785.106					94,25 %				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.520.000,-					2.520.000					100 %				

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	166.366.100,-					164.772.850					99,04 %				
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	23.641.000,-					22.633.250					95,74 %				
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN FISIK	15.053.200,-					14.154.400					94,03 %				
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN	27.168.900,-					27.011.300					99,42 %				

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA															
PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENGAWASAN	42.825.784,-					42.784.318					99,90 %				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**9.918.811.887**	**12.069.057.740,-**	**13.362.719.550,-**	**14.766.536.200,-**		**9.332.129**	**11.156.572.082,40**	**12.721.406.866,-**	**13.863.899.496,-**		**93%**	**92,44%**	**95,20%**	**93,89%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**8.000.000**	**40.062.800,-**	**66.562.000,-**	**79.537.800,-**		**8.000.000**	**39.286.602,2**	**66.434.000**	**79.528.700,-**		**100%**	**98,06%**	**99,81%**	**99,99%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000.000	2.000.000,-	1.978.000,-	11.121.700,-		2.000.000	1.976.000,-	1.936.000,-	11.121.700,-		100%	98,80%	97,88%	100%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.250.000,-	2.410.000,-				1.250.000,-	2.410.000,-				100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.250.000,-	2.975.000,-				1.192.000,-	2.974.000,-				95,36%	99,97%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.500.000	3.500.000,-	1.257.000,-	2.434.100,-		3.500.000	3.105.000,-	1.240.000,-	2.434.100,-		100%	88,71%	98,65%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.215.000,-	2.605.000,-				1.215.000,-	2.567.000,-				100%	98,54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.500.000	34.062.800,-	59.037.000,-	55.986.000,-		2.500.000	34.062.800,-	59.036.000,-	55.986.000,-		100%	100%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000,-	575.000,-	2.006.000,-			500.000,-	565.000,-	2.006.000,-			100%	98,26%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan		**9.059.090.817**	**10.885.092.000,-**	**11.220.739.000,-**	**11.923.736.000,-**		**8.461.026.996**	**10.049.695.061,-**	**10.675.158.482,-**	**11.163.594.565,-**		**93,40%**	**92,33%**	**95,14%**	**93,62%**

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.054.612.817	10.880.614.000,-	11.201.534000,-	11.904.531.000,-		8.456.566.986	10.045.217.061,-	10.655.953.482	11.144.392.555,-		93,40%	92,32%	95,13%	93,61%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		498.000	498.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-		480.000	498.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-		96,39%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		100%	100%	100%	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		180.000	180.000,-	575.000,-	575.000,-		180.000	180.000,-	575.000,-	575.000,-		100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		1.800.000	1.800.000,-	15.180.000-	15.180.000,-		1.800.000	1.800.000,-	15.180.000,-	15.180.000,-		100%	100%	100%	100%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		500.000	500.000,-	575.000,-	575.000,-		100%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**5.840.500,**	**7.034.500,-**				**5.746.000,-**	**6.957.500,-**				**98,38%**	**98,91%**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				932.500,-	1.102.500,-				884.000,-	1.070.000,-				94,80%	97,05%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.120.000,-	1.400.000,-				1.110.000,-	1.390.500,-				99,11%	99,32%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.088.000,-	1.157.000,-				1.072.000,-	1.132.000,-				98,53%	97,84%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang				900.000,-	1.125.000,-				897.000,-	1.117.000,-				99,67%	99,29%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Milik Daerah pada SKPD															
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				900.000,-	1.125.000,-				883.000,-	1.123.000,-				98,11%	99,82%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				900.000,-	1.125.000,-				900.000,-	1.125.000,-				100%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**4.369.000,**	**750.143.500,,-**				**4.315.750,-**	**745.972.500,-**				**98,78%**	**99,44%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.369.000,-	750.143.500,,-				4.315.750,-	745.972.500,-				98,78%	99,44%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**165.818.388**	**275.019.760,-**	**556.089.750,-**	**869.047.700,-**		**150.573.038,88**	**250.965.204,-**	**523.500.160,-**	**817.753.271,-**		**90,81%**	**91,25%**	**94,14%**	**94,10%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang		2.576.000	3.760.000,-	5.316.000,-	6.804.000,-		1.790.000	3.156.000,-	4.240.000,-	5.266.800,-		69,49%	83,94%	79,76%	77,41%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
an Bangunan Kantor															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		67.858.388	92.331.260,-	75.969.330-	74.702.800,-		57.669.638,88	74.762.196,-	60.037.600,-	65.448.800,-		84,99%	80,97%	79,03%	87,61%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.121.920-	35.889.000,-				32.515.363,-	23.382.541,-				75,40%	65,15%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		21.610.000	24.387.500,-	17.587.500-	17.144.900,-		18.692.600	23.230.200,-	12.842.770,-	11.859.800,-		86,50%	95,25%	73,02%	69,17%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.830.000	2.940.000,-	3.000.000,-	3.300.000,-		3.116.800	2.940.000,-	2.940.000,-	2.945.000,-		81,38%	100%	98%	89,24%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		69.944.000	151.601.000,-	402.155.00,-	723.937.000,-		69.304.000	146.876.808,-	401.994.427,-	701.557.330,-		99,08%	96,88%	99,96%	96,91%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.940.000	7.270.000,-				8.930.000,-	7.243.000,-				99,89%	99,63%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		**166.519.000**	**291.294.500,-**	**541.756.30 0,-**	**346.637.700,-**		**157.029.255**	**274.967.294,-**	**522.853.750,-**	**320.394.815,-**		**94,30%**	**94,39%**	**96,51%**	**92,43%**

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		166.519.000	291.294.500,-	541.756.30,-	346.637.700,-		157.029.255	274.967.294,-	522.853.570,-	320.394.815,-		94,30%	94,39%	96,51%	92,43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**386.543.392**	**355.421.680,-**	**379.151.00 0,-**	**399.679.000,-**		**367.877.521**	**350.433.459,2**	**376.619.325,-**	**393.214.900,-**		**90,82%**	**98,60%**	**99,33%**	**98,38%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.497.000	3.944.000,-	2.303.000,-	4.087.000,-		3.502.000	1.245.720,-	1.034.500,-	1.558.000,-		41,21%	31,59%	44,92%	38,12%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.600.000	3.600.000,-	3.600.000,-	3.900.000,-		2.569.271	2.645.686,-	2.656.325,-	3.219.900,-		38,93%	73,49%	73,79%	82,56%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.200.000	18.600.000 -	21.000.000,-			16.800.000	18.600.000,-	18.600.000,-			66,66%	100%	88,57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		346.246.392	347.877.680,-	354.648.00,-	370.692.000,-		345.006.249,72	346.542.053,2	354.328.500,-	369.837.000,-		99,64%	97,71%	95,59%	88,93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		**132.839.600**	**222.167.000,-**	**588.212.00 0,-**	**390.720.000,-**		**96.509.554**	**191.224.462,-**	**546.778.579,-**	**336.483.245,-**		**72,65%**	**86,07%**	**92,96%**	**86,12%**

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		89.359.600	51.719.000,-	26.660.000,-	26.710.000,-		60.206.625	39.056.778,-	16.631.873,-	17.905.446,-		67,38%	75,52%	62,39%	67,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			68.310.000,-	91.192.000,-	126.870.000,-			56.368.524,-	74.413.444,-	91.844.144,-			82,52%	81,60%	72,39%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.480.000	33.186.500,-	65.860.000,-	41.140.000,-		18.916.500	28.465.660,-	55.711.624,-	31.769.550,-		92,37%	85,77%	84,59%	77,22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		23.000.000	68.951.500,-	404.500.00,-	196.000.000,-		17.386.429,21	67.333.500,-	400.021.638,-	194.964.105,-		75,59%	97,65%	98,89%	99,47%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**196.388.888**	**225.394.440,-**	**321.518.110,-**	**304.107.550,-**		**169.062.400**	**217.359.617,-**	**312.422.949,-**	**294.981.753,-**		**86,09%**	**96,44%**	**97,17%**	**97%**
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**129.821.388**	**145.501.860,-**	**223.886.110,-**	**185.280.750,-**		**111.697.170**	**138.986.030,-**	**214.988.333,-**	**179.779.554,-**		**86,04%**	**95,52%**	**96,03%**	**97,03%**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		35.625.838	66.016.610,-	110.167.61,-	73.076.250,-		28.929.700	63.587.580,-	104.784.850,-	71.254.450,-		81,20%	96,32%	95,11%	97,51%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		55.511.000	39.956.250,-	66.480.750,-	65.001.600,-		48.445.700	36.459.200,-	64.963.194,,-	62.260.735,,-		87,27%	91,25%	97,72%	95,78%
Reviu Laporan Kinerja		10.225.650	8.980.250,-	10.375.750,-	11.361.000,-		10.196.970	8.967.250,-	10.364.700,-	11.273.000,-		99,72%	99,86%	99,89%	99,23%
Reviu Laporan Keuangan		7.317.400	7.887.500,-	8.716.000,-	7.696.000,-		6.861.400	7.762.250,-	8.681.750,-	7.403.975,-		93,77%	98,41%	99,61%	96,21%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		21.144.000	22.661.250,-	28.146.000,-	28.145.900,-		17.263.400	22.209.750,-	26.193.839,-	27.587.394,-		76,18%	98,01%	93,06%	98,02%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**66.567.500**	**79.892.580,-**	**97.632.000,-**	**118.826.800,-**		**57.365.230**	**78.373.587,-**	**97.434.616,-**	**115.202.199,-**		**86,18%**	**98,10%**	**99,80%**	**96,95%**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		4.064.000	2.900.000,-	7.174.000,-	7.140.000,-		680.000	2.543.000,-	7.155.000,-	7.116.000,-		16,73%	87,69%	99,74%	99,66%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		62.503.500	76.992.580,-	90.458.000,-	111.686.800,-		56.685.230	75.830.587,-	90.279.616,-	108.086.199,-		90,69%	98,49%	99,80%	96,78%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**237.691.700**	**410.883.800,-**	**492.613.500,-**	**445.263.200,-**		**231.813.100**	**393.224.440,-**	**461.678.908,-**	**426.077.320,-**		**97,53%**	**95,70%**	**93,72%**	**95,63%**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**36.007.000**	**44.459.500,-**	**94.044.500,-**	**78.401.000,-**		**84.696.300**	**44.020.990,-**	**87.555.990,-**	**77.556.000,-**		**97,54%**	**10,71%**	**17,77%**	**17,42%**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		34.307.000	33.689.500,-	78.914.500,-	63.361.000,-		33.710.200	33.373.950,-	72.862.990,-	62.723.000,-		98,26%	99,06%	92,33%	98,99%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun N					Prosentase Capaian Keuangan Tahun N				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		1.700.000	10.770.000,-	15.130.000-	15.040.000,-		1.411.000	10.647.040,-	14.693.000,-	14.833.000,-		83%	98,86%	97,11%	98,62%
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		**201.684.700**	**366.424.300,-**	**398.569.000,-**	**366.862.200,-**		**196.691.900**	**349.203.450,-**	**349.203.450,-**	**325.808.880,-**		**97,52%**	**95,30%**	**87,61%**	**88,81%**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		4.000.000	51.203.000,-	87.925.000-	67.629.800,-		3.994.000	48.493.800,-	84.096.065,-	65.981.000,-		99,85%	94,70%	95,64%	97,56%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		3.975.000	20.280.000,-	6.712.000,-	16.050.000		3.961.000	20.269.000,-	6.696.000,-	15.971.200,-		99,64%	99,94%	99,76%	99,50%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		181.831.700	273.884.700,-	279.514.00,-	259.211.400,-		177.064.700	259.731.650,-	260.747.853,-	243.227.400,-		97,37%	94,83%	93,28%	93.83%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		11.878.000	21.056.600,-	24.418.000-	23.971.000,-		11.672.200	20.709.000,-	22.583.000,-	23.341.720,-		98,27%	98,34%	97,37%	92,48%

Berdasarkan tabel diatas untuk capaian realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2020 s.d 2024 terdapat sisa penggunaan anggaran. Secara umum prosentase realisasi keuangan diatas 90%. Sisa penggunaan anggaran terdapat pada sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Adapun nilai anggaran TPP merupakan nilai perhitungan dari BKPSDM dan BPKAD, sehingga Perangkat Daerah tidak diperkenankan melakukan perhitungan sendiri.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran utama layanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah 48 Perangkat Daerah, 9 Bagian, 14 Kecamatan, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Bentuk layanan mengacu pada tugas Inspektorat Daerah yaitu membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan pelayanannya Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta menjalankan 2 peran yaitu selaku penjamin kualitas *(quality assurance)* melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan dalam rangka memberikan penilaian independen dan obyektif terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan oleh Perangkat Daerah, dan peran konsultasi *(consulting)* yaitu memberikan saran, bimbingan, dan solusi terkait manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola kepada instansi dan jalannya pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai pengawas namun juga sebagai konsultan yang membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah.

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam menjalankan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta bermitra dengan instansi internal dan eksternal di Pemerintah Kota Yogyakarta. Instansi internal adalah Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan Badan Usaha di Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan instansi eksternal meliputi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jendral pada Kementerian, Inspektorat Daerah Pemda DIY, dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).

2.6 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Kerja sama daerah yang telah dilakukan saat ini oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor 71/PERJ.YK/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat sinergisitas kerja sama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

2.7 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis daerah yaitu transformasi tata kelola pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Masih terdapat potensi fraud pada pelaksanaan tata kelola Pemerintahan di Kota Yogyakarta.
2. Perlu peningkatan kepatuhan PD terhadap kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, pemanfaatan dan pengelolaan keamanan system informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset, evaluasi atas pengukuran dan indikator kinerja secara periodik dan mekanisme pengelolaan keuangan.
3. Penguatan peran APIP dalam melakukan pengawasan intern secara preventif, adaptif, dan strategis guna memastikan akuntabilitas, efektivitas program, serta deteksi dini terhadap risiko penyimpangan di lingkungan pemerintahan
4. peran strategis APIP dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat belum optimal.
5. Kompleksitas birokrasi dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan strategis yang akan memperlambat proses pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
6. Peran konsultatif APIP untuk mendukung transformasi ASN yang professional dan berintegritas belum berdampak secara optimal mendukung kualitas layanan publik.
7. masih adanya kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait
   tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE serta audit TIK menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan berbagai aspek SPBE dalam proses implementasinya.

Dalam merumuskan isu strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta telah mendasarkan pada beberapa isu yaitu : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu

Global, Isu Nasional, Isu Regional, dan Isu Strategis Kota Yogyakarta. Adapun Isu-isu tersebut tertuang pada matriks sebagai berikut :

2.9 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Isu KLHS	No	Isu Global	No	Isu Nasional	No	Isu Regional	No	Isu Strategis Kota Yogyakarta
1	2		3		4		5		6
1	Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	1	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota	1	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	1	Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasiny	1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan
2	Pengelolaan Persampahan Yang Belum Optimal	2	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA	2	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan	2	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DI	2	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
3	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	3	Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global	3	Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana	3	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	3	Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan
4	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik	4	Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	4	Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional			4	Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan Good Government Governance
5	Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi			5	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional				
6	Belum optimalnya transportasi publik								
7	Penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban								

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 VISI DAN MISI RPJMD 2025-2029

Dalam Menyusun Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta mendasarkan pada visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD 2025-2029 adalah **"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"**. Visi tersebut diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan;
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari;
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945;
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah bidang pengawasan mendukung misi ke 4 (empat) yaitu "**Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945".**

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk dapat melaksanakan misi-misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Daerah. Adapun Tujuan Daerah Kota Yogyakarta yaitu :

1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian
2. Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY.

Inspektorat Daerah mendukung tujuan ke-4 (empat) yaitu **"Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY".**

Tujuan Daerah Kota Yogyakarta diatas kemudian dijabarkan kedalam Sasaran Daerah yang terdiri dari 8 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
5. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat
7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah

Untuk Sasaran Daerah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta mendukung Sasaran ke-7 yaitu : **"Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan".**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah yang disokong Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berorientasi pada penguatan pengawasan dalam mendukung terciptanya tatakelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik berorientasi pada pelayanan masyarakat yang baik. Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melalui fungsinya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan Penjaminan Mutu *(Quality Assurance)* dan Konsultasi *(Consulting)*.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran diatas, maka dapat dijelaskan melalui matriks berikut :

1.1. Matriks Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

VISI DAERAH	MISI DAERAH	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH
Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan	1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
			2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari	2. Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta	3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta

		berketahanan iklim dan bencana	berketahanan iklim dan bencana
	3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
			5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
			6. Menurunnya kemiskinan masyarakat
	4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945	2. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan
	5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY		8. Meningkatnya kondusivitas daerah

Ket : Bagian yang diblok adalah misi, tujuan, dan sasaran daerah yang diampu Inspektorat Daerah

3.3. STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP serta memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran serta isu strategis yang terpetakan serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Inspekorat Daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

3.2 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat Daerah											
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) (Nilai)	95,01	95,01	95,1	95,2	95,4	95,45	95,45	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembangunan dan penegakan integritas	Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3,366	3,466	3,556	3,646	3,736	3,815	3,896	
			Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (Nilai)	2,964	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384	
			Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah (Nilai)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	

Ket : Tabel diambil dari SIPD Kemendagri

3.4. PENAHAPAN RENSTRA

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis. Strategi penahapan tertuang dalam matriks berikut :

Tabel 3.3 Strategi dan Penahapan Renstra

(2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
Menyusun revisi panduan bukti dukung untuk penilaian Maturitas SPIP	Pendampingan Peningkatan Kapasitas SPIP dan/atau Manajemen Risiko pada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja dan/atau Pimpinan BUMD	Pendampingan Peningkatan Kapasitas SPIP dan/atau Manajemen Risiko pada Jabatan Administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau Pengelola Risiko BUMD	- Pendampingan Peningkatan Kapasitas SPIP dan/atau Manajemen Risiko pada Jabatan Pengawas/Ketua Tim Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja - Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD	- Pendampingan Peningkatan Kapasitas SPIP dan/atau Manajemen Risiko pada Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja - Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD	- Pendampingan Peningkatan Kapasitas SPIP dan/atau Manajemen Risiko pada Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja - Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD
Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD	- Pelaksanaan FGD SPIP dengan BPKP untuk penguatan APIP dan Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta - Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD	- Mengevaluasi kebijakan SPIP di Pemerintah Kota Yogyakarta - Melakukan evaluasi/penilaian Maturitas SPIP per PD			
	Penguatan pada dukungan pengawasan Kapabilitas APIP dengan titik berat pada komponen pengelolaan SDM	Penguatan pada dukungan pengawasan Kapabilitas APIP dengan titik berat pada komponen Praktek Profesional	Penguatan pada dukungan pengawasan Kapabilitas APIP dengan titik berat pada komponen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Penguatan pada dukungan pengawasan Kapabilitas APIP dengan titik berat pada komponen Budaya dan Hubungan Organisasi	Penguatan pada dukungan pengawasan Kapabilitas APIP dengan titik berat pada komponen Struktur dan Tata Kelola
Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen Peran dan Layanan Kapabilitas APIP	- Pelaksanaan FGD Kapabilitas APIP dengan BPKP untuk penguatan APIP - Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen	Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen Peran dan Layanan Kapabilitas APIP	Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen Peran dan Layanan Kapabilitas APIP	Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen Peran dan Layanan Kapabilitas APIP	Pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Elemen Peran dan Layanan Kapabilitas APIP

(2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
	Peran dan Layanan Kapabilitas APIP				
	Menyusun PPBR berdasarkan hasil evaluasi MR Strategis Pemkot	Melaksanakan audit kinerja sesuai hasil PPBR	Melaksanakan audit kinerja sesuai hasil PPBR	Melaksanakan audit kinerja sesuai hasil PPBR	Melaksanakan audit kinerja sesuai hasil PPBR
	Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	Pendampingan yang berfokus pada manajemen risiko kecurangan (fraud)	Evaluasi Efektifitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah		
		Evaluasi Efektifitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Evaluasi Efektifitas Manajemen Risiko Fraud Perangkat Daerah		
Penyusunan SOP Anti Korupsi level Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah	Sosialisasi SOP Anti Korupsi	Penyusunan Modul Pembelajaran anti korupsi	Pemantauan dan evaluasi SOP Anti Korupsi dan pembelajaran anti korupsi	Pemantauan dan evaluasi SOP Anti Korupsi dan pembelajaran anti korupsi	Pemantauan dan evaluasi SOP Anti Korupsi dan pembelajaran anti korupsi
	Penguatan Komponen Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada komponen pengukuran kinerja (SAKIP)	Penguatan Komponen Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada komponen Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Penguatan komponen Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada komponen : 1. Indeks Pembangunan Statistik 2. Indeks Profesionalitas ASN	Penguatan komponen Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada komponen : 1. Penilaian Pengawasan Arsip Internal 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Penguatan komponen Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada komponen : 1. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah 2. Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP

3.5 PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan strategi serta arah kebijakan yang dipilih sebagai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.4. Perumusan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	**Tujuan :** Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional 2. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi	1. Terselenggaranya pengawasan internal sesuai tatakala dan aturan yang berlaku 2. Terlaksananya pendampingan dan asistensi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah 3. Terlaksananya perumusan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku 4. Penguatan peran APIP melalui peningkatan kapasitas APIP	
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas			
3	**Sasaran 2 :** Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif			

3.6 KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH LAIN *(CROSSCUTTING)*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Perangkat Daerah lain yang menjadi mitra. Perangkat Daerah tersebut terlibat dalam kegiatan eksternal maupun internal yang dijelaskan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 3.5. *Croscutting* Eksternal & Internal

No	Perangkat Daerah	Eksternal	Internal
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data

No	Perangkat Daerah	Eksternal	Internal
			Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
	Sekretariat Daerah		Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
	Inspektorat Daerah		Pengawasan dan Consulting
	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian		Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan kearsipan
	Seluruh Perangkat Daerah sebagai Auditan		Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan reviu
	Badan Pemeriksa Keuangan	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	
	Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	
	Irjen Kementerian	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Dearah Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Dimulai dari Sasaran RPJMD yang relevan, tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, Program/Kegiatan/Subkegiatan. Berikut disajikan tabel tentang rencana program, kegiatan yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah							
Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	T.1 Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan				T.1 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan					T.2 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP)		
		S.1.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas			S.1.1.1 Manajemen Risiko Indeks		
					S.1.1.2 Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi		
					S.1.1.3 Nilai Kapabilitas APIP		
			OC.1.1.1 Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola		OC.1.1.1 Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola	PROG 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT.1.1.1.1 Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organsiasi	OT.1.1.1.1 Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi	KEG 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT. 1.1.1.2 Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola	OT. 1.1.1.2 Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Akuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & Tata Kelola	KEG 1.2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			OC. 1.1.2 Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan		OC. 1.1.2 Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	PROG 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				OT 1.1.2.1 Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan	OT 1.1.2.1 Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	KEG 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						SUBKEG 2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
						SUBKEG 2.1.2 Kerja Sama Pengawasan Internal	
					OT 1.1.2.2 Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	KEG 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						SUBKEG 2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
						SUBKEG 2.1.2 Kerja Sama Pengawasan Internal	
			OC. 1.1.3 Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset		OC. 1.1.3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset	PROG 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT 1.1.3.1 Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	OT 1.1.3.1 Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	KEG. 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						SUBKEG 2.1.1 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 2.1.2 Reviu Laporan Keuangan	
					OT 1.1.3.2 Kepatuhan PD terhadap Penyelesaian Kerugian Keuangan & Aset	KEG. 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
						SUBKEG 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			OC. 1.1.4 Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah		OC. 1.1.4 Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	PROG 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT. 1.1.4.1 Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	OT. 1.1.4.1 PD Dengan Nilai SPIP 3,00	KEG 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
						SUBKEG 2.1.1 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			OC. 1.1.5 Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah		OC. 1.1.5 Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	PROG 2 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT 1.1.5.1 Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	OT 1.1.5.1 Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	KEG 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						SUBKEG 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 2.1.2 Reviu Laporan Kinerja	
			OC. 1.1.6 Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah		OC. 1.1.6 Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	PROG 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT. 1.1.6.1 Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	OT. 1.1.6.1 PD dengan Nilai ZI Minimal 75	KEG 3.1 Pendampingan dan Asistensi	
						SUBKEG 3.1.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						SUBKEG 3.1.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
						SUBKEG 3.1.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
				OT. 1.1.6.2 Jumlah PD dengan nilai RB > 85	OT. 1.1.6.2 Jumlah PD dengan nilai RB > 85	KEG 3.1 Pendampingan dan Asistensi	
						SUBKEG 3.1.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						SUBKEG 3.1.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
						SUBKEG 3.1.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			OC. 1.1.7 Meningkatnya Responsivitas PD		OC. 1.1.7 Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	PROG 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT 1.1.7. 1 Meningkatnya Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%	OT 1.1.7. 1 PD dengan tingkat responsivitas > 90%	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			OC. 1.1.8 Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah		OC. 1.1.8 Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	PROG 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS	
				OT. 1.1.8.1 Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	OT. 1.1.8.1 PD Dengan Nilai MRI >3,00	KEG 3.1 Pendampingan dan Asistensi	
						SUBKEG 3.1.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			OC. 1.1.9 Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah		OC. 1.1.9 Persentase PD dengan IEPK > 2,8	PROG 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT. 1.1.9.1 Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai IEPK >2,8	OT. 1.1.9.1 PD Dengan IEPK > 2,8	KEG 3.1 Pendampingan dan Asistensi	
						SUBKEG 3.1.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			OC. 1.1.10 Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan		OC. 1.1.10 Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	PROG 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT. 1.1.10.1 Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	OT. 1.1.10.1 Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					OT. 1.1.10.2 Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					OT. 1.1.10.3 Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					OT. 1.1.10. 4 Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi	KEG 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						SUBKEG 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		S.1.2 Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif			S.1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah		
			OC.1.2.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah		OC.1.2.1 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	PROG 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					OC.1.2.2 Nilai SPIP Inspektorat Daerah	PROG 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					OC.1.2.3 Nilai IKM Inspektorat Daerah	PROG 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT.1.2.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	OT.1.2.1.1 Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah	KEG 3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						SUBKEG 3.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						SUBKEG 3.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						SUBKEG 3.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						SUBKEG 3.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					OT.1.2.1.2 Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah	KEG 3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						SUBKEG 3.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						SUBKEG 3.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						SUBKEG 3.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						SUBKEG 3.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				OT.1.2.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	OT.1.2.1.2 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	KEG 3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						SUBKEG 3.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						SUBKEG 3.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						SUBKEG 3.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						SUBKEG 3.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						SUBKEG 3.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						SUBKEG 3.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				OT.1.2.1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	OT.1.2.1.3 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	KEG 3.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						SUBKEG 3.3.2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						SUBKEG 3.3.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						SUBKEG 3.3.4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						SUBKEG 3.3.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						SUBKEG 3.3.6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				OT.1.2.1.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	OT.1.2.1.4 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	KEG 3.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						SUBKEG 3.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						SUBKEG 3.4.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						SUBKEG 3.4.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						SUBKEG 3.4.4 Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				OT.1.2.1.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	OT.1.2.1.5 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	KEG 3.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 3.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				OT.1.2.1.6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	OT.1.2.1.6 Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah	KEG 3.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						SUBKEG 3.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						SUBKEG 3.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						SUBKEG 3.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						SUBKEG 3.6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						SUBKEG 3.6.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT.1.2.1.7 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah	OT.1.2.1.7 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah	KEG 3.7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						SUBKEG 3.7.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				OT.1.2.1.8 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	OT.1.2.1.8 Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah	KEG 3.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						SUBKEG 3.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						SUBKEG 3.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						SUBKEG 3.8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta telah dirumuskannya Program, Kegiatan, dan Subkegiatan maka perlu direncanakan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan. Adapun rincian pendanaan terlampir pada matriks berikut :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					15.414.068.055		14.681.810.605		14.980.428.856		15.360.660.060		15.778.249.509		16.321.579.835		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.231.079.055		13.862.846.605		14.144.807.129		14.503.830.253		14.898.122.499		15.411.141.252		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	A	Nilai	A	14.231.079.055												
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai)	A	Nilai			A	13.459.766.605	A	13.741.461.082	A	14.100.146.483	A	14.444.066.667	A	14.946.601.338	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
	Nilai SPIP Inspektorat Daerah (Nilai)	4,514	Nilai			4,53		4,55		4,6		4,65		4,7			
	Nilai IKM Inspektorat Daerah (Nilai)	89,91	Nilai			89,93		89,95		89,95		89,97		89,97			
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.214.000		64.014.100		65.316.147		68.031.257		68.793.865		81.163.123		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	Laporan			1	60.934.100	1	61.970.100	1	64.347.487	1	64.738.033	1	66.623.209		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Laporan			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen			3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	Laporan			10		10		10		10		10			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					23.598.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen	3	23.598.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.240.000		1.470.000		1.499.900		1.537.967		1.579.785		1.634.192		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	2.240.000	1	1.470.000	1	1.499.900	1	1.537.967	1	1.579.785	1	1.634.192		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.220.000		975.000		994.832		1.020.080		1.047.816		1.083.903		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*		*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	2.220.000	1	975.000	1	994.832	1	1.020.080	1	1.047.816	1	1.083.903		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.120.00		1.427.100		1.456.127		1.493.084		1.533.681		1.586.501		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	2.120.00	1	1.427.100	1	1.456.127	1	1.493.084	1	1.533.681	1	1.586.501		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2.588.000		690.000		704.035		721.903		741.532		767.070		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	2.588.000	1	690.000	1	704.035	1	721.903	1	741.532	1	767.070		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					56.843.000		45.092.000		46.009.171		48.235.271		48.459.624		50.128.573		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	Laporan	15	56.843.000	10	45.092.000	10	46.009.171	10	48.235.271	10	48.459.624	10	50.128.573		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.605.000		1.280.000		1.306.035		1.339.182		1.375.595		1.422.970		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	Laporan		2.605.000	1	1.280.000	1	1.306.035	1	1.339.182	1	1.375.595	1	1.422.970		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.609.890.000		11.543.106.000		11.777.883.048		12.076.833.589		12.405.135.768		12.832.296.060		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	Dokumen			3	11.543.106.000	3	11.777.883.048	3	12.076.833.589	3	12.405.135.768	3	12.832.296.060		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	Dokumen			3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	Dokumen			2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Laporan			1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76	Orang			75		75		75		75		75			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	Laporan			12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	Dokumen			3		3		3		3		3			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.593.215.000		11.520.474.000		11.754.790.711		12.053.155.171		12.380.813.533		12.807.136.167		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*		*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76	Orang	75	11.593.215.000	75	11.520.474.000	75	11.754.790.711	75	12.053.155.171	75	12.380.813.533	75	12.807.136.167		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					575.000		575.000		586.696		601.586		617.943		639.225		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	Dokumen	2	575.000	2	575.000	2	586.696	2	601.586	2	617.943	2	639.225		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					575.000		2.300.000		2.346.782		2.406.343		2.471.772		2.556.900		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	Dokumen	3	575.000	3	2.300.000	3	2.346.782	3	2.406.343	3	2.471.772	3	2.556.900		
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.300.000		2.300.000		2.346.782		2.406.343		2.471.772		2.556.900		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	Dokumen	3	2.300.000	3	2.300.000	3	2.346.782	3	2.406.343	3	2.471.772	3	2.556.900		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					575.000		575.000		586.696		601.586		617.943		639.225		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Laporan	1	575.000	1	575.000	1	586.696	1	601.586	1	617.943	1	639.225		
6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					575.000		575.000		586.696		601.586		617.943		639.225		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	Dokumen	3	575.000	3	575.000	3	586.696	3	601.586	3	617.943	3	639.225		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					11.500.000		15.732.000		16.051.989		16.459.388		16.906.919		17.489.193		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	Laporan	12	11.500.000	12	15.732.000	12	16.051.989	12	16.459.388	12	16.906.919	12	17.489.193		
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					575.000		575.000		586.696		601.586		617.943		639.225		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Dokumen	1	575.000	1	575.000	1	586.696	1	601.586	1	617.943	1	639.225		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.034.500		6.883.000		7.023.002		7.201.245		7.397.076		7.651.829		
meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	[redacted]		1	6.883.000	1	7.023.002	1	7.201.245	1	7.397.076	1	7.651.829		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	Laporan			1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan			1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.102.500		1.020.000		1.040.747		1.067.161		1.096.181		1.133.934		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	1.102.500	1	1.020.000	1	1.040.747	1	1.067.161	1	1.096.181	1	1.133.934		
6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.400.000		1.400.000		1.428.476		1.464.731		1.504.563		1.556.380		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.428.476	1	1.464.731	1	1.504.563	1	1.556.380		
6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1.157.000		1.088.000		1.110.130		1.138.305		1.169.260		1.209.529		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	Laporan	1	1.157.000	1	1.088.000	1	1.110.130	1	1.138.305	1	1.169.260	1	1.209.529		
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.125.000		1.125.000		1.147.883		1.177.016		1.209.024		1.250.662		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	1	1.125.000	1	1.125.000	1	1.147.883	1	1.177.016	1	1.209.024	1	1.250.662		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.125.000		1.125.000		1.147.883		1.177.016		1.209.024		1.250.662		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	Laporan	1	1.125.000	1	1.125.000	1	1.147.883	1	1.177.016	1	1.209.024	1	1.250.662		
6.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1.125.000		1.125.000		1.147.883		1.177.016		1.209.024		1.250.662		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	1.125.000	1	1.125.000	1	1.147.883	1	1.177.016	1	1.209.024	1	1.250.662		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					753.706.000		715.350.000		729.900.219		748.425.087		768.774.765		795.251.368		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	Dokumen			1	715.350.000	1	729.900.219	1	748.425.087	1	768.774.765	1	795.251.368		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					753.706.000		715.350.000		729.900.219		748.425.087		768.774.765		795.251.368		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	Dokumen	1	753.706.000	1	715.350.000	1	729.900.219	1	748.425.087	1	768.774.765	1	795.251.368		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					803.618.055		668.506.205		682.103.622		683.842.998		736.101.243		738.738.324		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	Dokumen			12	268.506.205	12	282.103.622	12	283.842.998	12	286.101.243	12	288.738.324		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	Dokumen			1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan			12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*		*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Paket			2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket			1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket			3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Paket			1		1		1		1		1			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.164.000		6.164.000		6.289.376		6.449.000		6.624.348		6.852.491		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	1	6.164.000	1	6.164.000	1	6.289.376	1	6.449.000	1	6.624.348	1	6.852.491		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.420.075		60.540.225		61.771.613		61.771.613		61.771.613		61.771.613		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	3	65.420.075	3	60.540.225	3	61.771.613	3	61.771.613	3	61.771.613	3	61.771.613		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					27.185.000		20.267.000		20.679.231		21.204.070		21.780.608		22.530.732		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Paket	1	27.185.000	1	20.267.000	1	20.679.231	1	21.204.070	1	21.780.608	1	22.530.732		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					16.419.980		14.259.980		14.550.028		14.919.308		15.324.964		15.852.755		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Paket	2	16.419.980	2	14.259.980	2	14.550.028	2	14.919.308	2	15.324.964	2	15.852.755		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.300.000		3.540.000		3.612.004		3.703.676		3.804.379		3.935.402		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	Dokumen	12	3.300.000	12	3.540.000	12	3.612.004	12	3.703.676	12	3.804.379	12	3.935.402		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					677.859.000		155.115.000		166.406.039		167.000.000		168.000.000		169.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	12	677.859.000	12	155.115.000	12	166.406.039	12	167.000.000	12	168.000.000	12	169.000.000		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7.270.000		8.620.000		8.795.331		8.795.331		8.795.331		8.795.331		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	1	7.270.000	1	8.620.000	1	8.795.331	1	8.795.331	1	8.795.331	1	8.795.331		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					92.525.000		94.973.000		96.904.700		114.364.193		103.864.158		108.347.249		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	Unit			6	94.973.000	6	96.904.700	6	114.364.193	6	103.864.158	6	108.347.249		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					92.525.000		94.973.000		96.904.700		114.364.193		103.864.158		108.347.249		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	Unit	6	92.525.000	6	94.973.000	6	96.904.700	6	114.364.193	6	103.864.158	6	108.347.249		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.559.000		474.299.800		483.947.058		508.537.838		509.722.118		526.970.229		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	Laporan			12	474.299.800	12	483.947.058	12	508.537.838	12	509.722.118	12	526.970.229		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan			12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan			12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan			12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.087.000		4.087.000		4.170.130		4.170.130		4.392.231		4.392.231		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	Laporan	12	4.087.000	12	4.087.000	12	4.170.130	12	4.170.130	12	4.392.231	12	4.392.231		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.800.000		4.200.000		4.285.428		4.285.428		4.513.670		4.513.670		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	12	4.800.000	12	4.200.000	12	4.285.428	12	4.285.428	12	4.513.670	12	4.513.670		
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.800.000		25.800.000		26.324.772		26.992.895		27.726.832		28.681.744		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	12	25.800.000	12	25.800.000	12	26.324.772	12	26.992.895	12	27.726.832	12	28.681.744		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					415.872.000		440.212.800		449.166.728		473.089.385		473.089.385		489.382.584		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	12	415.872.000	12	440.212.800	12	449.166.728	12	473.089.385	12	473.089.385	12	489.382.584		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.532.500		295.714.500		301.729.333		296.594.046		298.333.506		320.723.070		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	Unit			6	295.714.500	6	301.729.333	6	296.594.046	6	298.333.506	6	320.723.070		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit			1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	Unit			18		18		18		18		18			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit			1		1		1		1		1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					26.000.000		22.632.000		23.092.335		23.678.418		24.322.235		25.159.892		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit	1	26.000.000	1	22.632.000	1	23.092.335	1	23.678.418	1	24.322.235	1	25.159.892		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					175.890.000		156.067.500		159.241.913		167.723.150		167.723.150		173.499.536		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	Unit	18	175.890.000	18	156.067.500	18	159.241.913	18	167.723.150	18	167.723.150	18	173.499.536		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.915.000		38.515.000		39.298.395		40.295.788		41.391.431		42.816.952		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	Unit	6	35.915.000	6	38.515.000	6	39.298.395	6	40.295.788	6	41.391.431	6	42.816.952		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					183.727.500		78.500.000		80.096.690		64.896.690		64.896.690		79.246.690		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Unit	1	183.727.500	1	78.500.000	1	80.096.690	1	64.896.690	1	64.896.690	1	79.246.690		
Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola (Nilai)	1,99	Nilai			2,08	403.080.000	2,1	403.346.047	2,14	403.683.770	2,18	454.055.832	2,22	464.539.914		
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							64.014.100		65.316.147		68.031.257		68.793.865		81.163.123		
Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen			3	3.080.000	3	3.346.047	3	3.683.770	3	4.055.832	3	14.539.914		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3.080.000		3.346.047		3.683.770		4.055.832		14.539.914		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen			3	3.080.000	3	3.346.047	3	3.683.770	3	4.055.832	3	14.539.914		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							668.506.205		682.103.622		683.842.998		736.101.243		738.738.324		
Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organsiasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan			12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							400.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan			12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					387.409.100		359.214.000		366.520.412		375.822.701		386.041.321		399.336.583		
Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur meningkat	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	100%	Persentase	94,74%													
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	100%	Persentase	96%													
Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	100%	Persentase	96%	387.409.100												
Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana Prasarana meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	Persentase	96%													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Persentase	96%													
Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset (Persentase)	100	Persentase			95,65	81.566.000	95,65	83.225.052	95,65	85.337.304	95,65	87.657.626	95,65	90.676.555	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal					220.739.100,00		211.262.000		215.559.069		221.029.959		227.039.764		234.859.012		
Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	Laporan			1	76.806.000	1	78.368.234	1	80.357.220	1	82.542.133	1	85.384.884		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	35	Laporan			35		35		35		35		35			
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					79.446.000		67.782.000		69.160.686		70.915.984		72.844.190		75.352.944		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	35	Laporan	35	79.446.000	35	67.782.000	35	69.160.686	35	70.915.984	35	72.844.190	35	75.352.944		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan					8.827.300		9.024.000		9.207.548		9.441.236		9.697.943		10.031.940		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	Laporan	1	8.827.300	1	9.024.000	1	9.207.548	1	9.441.236	1	9.697.943	1	10.031.940		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					166.670.000		147.952.000		150.961.343		154.792.742		159.001.557		164.477.571		
Kepatuhan PD terhadap Penyelesaian Kerugian Keuangan & Aset	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	Laporan			1	4.760.000	1	4.856.818	1	4.980.084	1	5.115.493	1	5.291.671		
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					7.140.000		4.760.000		4.856.818		4.980.084		5.115.493		5.291.671		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	Laporan	1	7.140.000	1	4.760.000	1	4.856.818	1	4.980.084	1	5.115.493	1	5.291.671		
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 (Persentase)	54,76	Persentase			73,81	97.565.000	83,33	99.549.472	92,86	102.076.038	100	104.851.486	100	108.462.570		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal					220.739.100		211.262.000		215.559.069		221.029.959		227.039.764		234.859.012		
Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP & 86,0	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	Laporan			1	97.565.000	1	99.549.472	1	102.076.038	1	104.851.486	1	108.462.570		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	57	Laporan			57		57		57		57		57			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					96.376.000		87.245.000		89.019.563		91.278.880		93.760.753		96.989.873		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	57	Laporan	57	96.376.000	57	87.245.000	57	89.019.563	57	91.278.880	57	93.760.753	57	96.989.873		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja					11.530.000		10.320.000		10.529.909		10.797.158		11.090.733		11.472.697		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	Laporan	1	11.530.000	1	10.320.000	1	10.529.909	1	10.797.158	1	11.090.733	1	11.472.697		
Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 (Persentase)	57,14	Persentase			66,67	143.192.000	71,43	146.104.525	78,57	149.812.658	85,71	153.886.064	92,86	159.185.900		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					166.670.000		147.952.000		150.961.343		154.792.742		159.001.557		164.477.571		
Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	25	Laporan			1	143.192.000	1	146.104.525	1	149.812.658	1	153.886.064	1	159.185.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					159.530.000		143.192.000		146.104.525		149.812.658		153.886.064		159.185.900		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	25	Laporan		159.530.000	1	143.192.000	1	146.104.525	1	149.812.658	1	153.886.064	1	159.185.900		
Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (Persentase)	100				96	36.891.000	96,25	37.641.363	97	38.596.701	97,25	39.646.145	97,5	41.011.558		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Persentase		220.739.100		211.262.000		215.559.069		221.029.959		227.039.764		234.859.012		
Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	Dokumen			5	36.891.000	5	37.641.363	5	38.596.701	5	39.646.145	5	41.011.558		
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	Kesepakatan			1		1		1		1		1			
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal							17.716.000		18.076.343		18.535.121		19.039.091		19.694.797		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	Kesepakatan			1	17.716.000	1	18.076.343	1	18.535.121	1	19.039.091	1	19.694.797		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					24.559.800		19.175.000		19.565.020		20.061.580		20.607.054		21.316.761		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	Dokumen	5	24.559.800	5	19.175.000	5	19.565.020	5	20.061.580	5	20.607.054	5	21.316.761		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					795.579.900		459.750.000		469.101.315		481.007.106		494.085.689		511.102.000		
Meningkatnya nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	63,64%	Persentase	45, 45 %	795.579.900												
nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	70%	Persentase	60%													
nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	45,45%	Persentase	54,55%													
nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	50%	Persentase	60%													
Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1. Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 (Persentase)	97,61	Persentase			97,62	40.000.000	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.000.000	100	45.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi					710.883.900		393.444.000		401.446.651		411.635.367		422.827.732		437.389.919		
Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI & 3,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah			44	40.000.000	44	40.000.000	44	42.000.000	44	44.000.000	44	45.000.000		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					108.317.900		40.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah	44	108.317.900	44	40.000.000	44	40.000.000	44	42.000.000	44	44.000.000	44	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*		*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM (Persentase)	9,52	Persentase			11,9	307.120.000	14,29	313.366.821	14,29	321.320.071	16,67	330.056.763	16,67	341.423.918		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi					710.883.900		393.444.000		401.446.651		411.635.367		422.827.732		437.389.919		
Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	Kegiatan			4	307.120.000	4	313.366.821	4	321.320.071	4	330.056.763	4	341.423.918		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah			44		44		44		44		44			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah			44		44		44		44		44			
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					18.413.000		16.748.000		17.088.654		17.522.364		17.998.797		18.618.676		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah	44	18.413.000	44	16.748.000	44	17.088.654	44	17.522.364	44	17.998.797	44	18.618.676		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					548.545.000		256.140.000		261.349.888		267.982.948		275.269.404		284.749.682		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	Kegiatan	4	548.545.000	4	256.140.000	4	261.349.888	4	267.982.948	4	275.269.404	4	284.749.682		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					35.608.000		34.232.000		34.928.279		35.814.759		36.788.562		38.055.560		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah	44	35.608.000	44	34.232.000	44	34.928.279	44	35.814.759	44	36.788.562	44	38.055.560		
Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	2. Persentase PD dengan IEPK > 2,8 (Persentase)	47,62	Persentase			57,14	46.324.000	61,9	48.079.830	66,67	48.315.296	71,43	48.770.969	76,19	50.966.001		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi					710.883.900		393.444.000		401.446.651		411.635.367		422.827.732		437.389.919		
Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai IEPK & 2,8	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah			44	46.324.000	44	48.079.830	44	48.315.296	44	48.770.969	44	50.966.001		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					108.317.90		46.324.000		48.079.830		48.315.296		48.770.969		50.966.001		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	44	Perangkat Daerah	44	108.317.90	44	46.324.000	44	48.079.830	44	48.315.296	44	48.770.969	44	50.966.001		
Meningkatnya Responsivitas PD	Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% (Persentase)	100	Persentase			93,75	9.780.000	100	9.978.925	100	10.232.190	100	10.510.404	100	10.872.382		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					84.696.000		66.306.000		67.654.664		69.371.739		71.257.957		73.712.081		
Meningkatnya Jumlah PD dengan tingkat responsivitas & 90%	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	Rekomendasi			1	9.780.000	1	9.978.925	1	10.232.190	1	10.510.404	1	10.872.382		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN TARGET	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*		*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					15.040.000		9.780.000		9.978.925		10.232.190		10.510.404		10.872.382		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	Rekomendasi	1	15.040.000	1	9.780.000	1	9.978.925	1	10.232.190	1	10.510.404	1	10.872.382		
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	1,2	Nilai			1,2	56.526.000	1,2	57.675.739	1,2	59.139.549	1,2	60.747.553	1,2	62.839.699		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					84.696.000		66.306.000		67.654.664		69.371.739		71.257.957		73.712.081		
Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	Rekomendasi			3	56.526.000	3	57.675.739	3	59.139.549	3	60.747.553	3	62.839.699		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					69.656.000		56.526.000		57.675.739		59.139.549		60.747.553		62.839.699		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	Rekomendasi	3	69.656.000	3	56.526.000	3	57.675.739	3	59.139.549	3	60.747.553	3	62.839.699		

Ket : Bagian yang diblok hitam adalah indikator yang tidak dipakai pada tahun bersangkutan, dan bagian yang diblok warna hijau adalah sasaran dan indikator yang dipakai pada tahun 2025

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah memiliki Program Prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Adapun Program Prioritas Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dijabarkan pada matriks berikut :

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah					
1.	ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
				6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.		6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Meningkatnya Responsivitas PD	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Meningkatnya Responsivitas PD	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pengawasan telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta juga telah menetapkan IKU sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan IKU dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan. Adapun IKU pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah									
2.	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU & IKK
3.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP)	Nilai	95,01	95,01	95,1	95,2	95,4	95,45	95,45	
4.	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,366	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,896	
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Nilai	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	
6.	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai	2,964	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384	
7.	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU & IKK

4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah diperlukan tolak ukur untuk mengukur kinerja yang juga merupakan tolak ukur dalam penyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kemudian disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta memiliki IKK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU & IKK
3.	Nilai Kapabilitas APIP	positif	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU & IKK

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi dan Misi RPJMD, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029, dan isu strategis aktual.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Pemerintah Daerah. Adapun pengelompokan program maupun kegiatan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif dan kebutuhan anggaran telah disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk menunjang visi dan misi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Perhitungan kebutuhan disesuaikan standarisasi harga barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keseuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika Pembangunan Daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan menjadi pedoman seluruh jajaran di Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dan menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat secara optimal dijalankan sehingga tercapai kinerja yang optimal dan akuntabel.

LAMPIRAN 1

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

MISI 3
(Rotasi dari RPJPD 2025-2029)

Mewujudkan Perapatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola

SASARAN PEMKOT YOGYAKARTA

Terwujudnya
tata kelola pemerintahan
yang baik dan
adaptif

TUJUAN INSPEKTORAT

Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan

Indikator :
1. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Indeks Pengelolaan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP)

INDUK/ULTIMATE OUTCOME 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pencegahkan integritas

Indikator :
1. Manajemen Risiko Indeks
2. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi
3. Nilai Kapabilitas APIP

INDUK/ULTIMATE OUTCOME 2

Meningkatnya Tata Kelolainspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif

Indikator :
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

INTERMEDIATE OUTCOME 1

Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan (IK : Rata-rata Penantese Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal)

INITIAL OUTCOME 1

Ketaatan PD terhadap Pemeriksaan

IK : 1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat

2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

OUTPUT

Terlaksananya monitoring TLHP

Indikator :
Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring TLHP

Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal

Indikator :
Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terformlik

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. BPK
2. BPKP
3. Inspektorat Pemda DIY
4. Irjen Kementerian
5. Seluruh Perangkat Daerah sebagai Auditan

DUKUNGAN KEGIATAN

1, 2, 3, 4 : Koordinasi lintasnya Vertikal dantlreprosi Pusat terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tindak lanjutnya

5 : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

INTERMEDIATE OUTCOME 2

Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset

(IK : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset)

INITIAL OUTCOME 2

Ketaatan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset

IK : Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset

OUTPUT

Terlaksananya pengawasan pendapatan, belanja & pembiayaan.

Indikator :
jumlah dokumen pengawasan pendapatan, belanja & pembiayaan

Terlaksananya Reviu Pengelolaan Dana BOS

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Terlaksananya reviu tata kelola BMD

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan reviu tata kelola BMD

Terlaksananya evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah

Terlaksananya reviu dokumen penganggaran daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen penganggaran daerah

Terlaksananya reviu dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah

Terlaksananya reviu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya reviu standar satuan harga/ analisa satuan

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan eviu standar satuan harga/ analisa satuan

Terlaksanannya Reviu DAK dan DAU

Indikator :
Jumlah dokumen hasil reviu DAK dan DAU

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. BPKAD
2. PD pengampu PAD
3. Sekretariat Daerah
4. Dinas Dikpora
5. PD pemetima DAU & DAK

DUKUNGAN KEGIATAN

Perangkat Daerah penyedia data dalam rangka reviu

INTERMEDIATE OUTCOME 3

Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah (IK : Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00)

INITIAL OUTCOME 4

Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00

(IK : PD SPIP Dengan Nilai 3,00)

OUTPUT

Terlaksanannya Penilaian SPIP Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen Penilaian SPIP Perangkat Daerah

Terlaksanannya Penjaminan Kualitas SPIP Kota Yogyakarta

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP Kota Yogyakarta

Terlaksanannya Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Kota Yogyakarta

Indikator :
jumlah dokumen Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Kota Yogyakarta

Terlaksanannya Audit Dengan Tujuan tertentu/Investigasi/Tematik

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Audit Dengan Tujuan tertentu/Investigasi/Tematik

Terlaksanannya Audit probity

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Audit probity

Terlaksanannya monitoring barang/jasa

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan monitoring barang/ jasa

Terlaksanannya reviu/evaluasi/ pemantauan tematik tertentu

Indikator :
jumlah dokumen reviu/evaluasi/ pemantauan tematik tertentu

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Sekretariat Daerah selaku Koordinator PM SPIP
2. PD Tim Satgas SPIP
3. Seluruh PD selaku auditan

DUKUNGAN KEGIATAN

PD selaku auditan penyedia data

INTERMEDIATE OUTCOME 4

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah (IK : Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0)

INITIAL OUTCOME 3

Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP >86

(IK : PD dengan nilai SAKIP AA)

OUTPUT

Terlaksanannya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Terlaksanannya monitoring tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Terlaksanannya reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terlaksanannya reviu dokumen perencanaan daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen perencanaan daerah

Terlaksanannya Audit Kinerja

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Audit Kinerja

Terlaksanannya Audit Operasional

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Audit Operasional

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. SAKIP : Seluruh OPD
2. Bappeda
3. Bagian Tata Pemerintahan

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Seluruh PD selaku penyedia data penilaian SAKIP
2. Bappeda : selaku penyedia data perencanaan di Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Bagian Tapem : selaku koordinator penyusun LPPD pemerintah Kota Yogyakarta

---

INTERMEDIATE OUTCOME 5

Meningkatnya Tata Integritas Penyelenggara Daerah (IK : Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM)

INITIAL OUTCOME 5

Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75

IK : 1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75

2. PD dengan nilai RB > 85

OUTPUT

Terlaksanannya Evaluasi RB Tingkat Kota Yogyakarta

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi RB Tingkat Kota Yk

Terlaksanannya MCP KPK

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan MCP KPK

Terlaksanannya fasilitasi sapu bersih pungutan liar

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi sapu bersih pungutan liar

Terlaksanannya pelaksanaan whistle blowing system

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan whistle blowing system

Terlaksanannya Penelitian dan pengolahan informasi

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan PPI

Terlaksanannya Penilaian Zona Integritas perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen penilaian pelaksanaan ZI PD

Terlaksanannya money pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN

Indikator :

Terlaksanannya pengendalian gratifikasi

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Terlaksanannya pengendalian benturan kepentingan

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian bentuan kepentingan

Terlaksanannya Pencegahan Korupsi

Indikator :
jumlah Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Perangkat Daerah selaku Leading Sector RB
2. Perangkat Daerah Selaku Leading Sector MCP KPK
3. Perangkat Daerah Pengampu Komponen Saber Pungli
4. Seluruh Perangkat Daerah untuk LHKAN
5. Seluruh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pengendalian bentuan kepentingan, pencegahan korupsi, dan pengendalian gratifikasi

DUKUNGAN KEGIATAN

Penyediaan data untuk penilaian dan pemantauan

INTERMEDIATE OUTCOME 6

Meningkatnya Responsivitas PD (IK : Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%)

INITIAL OUTCOME 7

Meningkatnya Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%

(IK : PD dengan tingkat responsivitas > 90%)

OUTPUT

Fasilitasi Survey penilaian Integritas

Indikator : jumlah dokumen jenis data populasi

CROSSCUTTING

NAMA PD

Seluruh Perangkat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

Selaku Responden SPI

INTERMEDIATE OUTCOME 7

Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

(IK : Persentase PD dengan nilai MRI >3,00

INITIAL OUTCOME 6

Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00

(IK : PD Dengan Nilai MRI >3,00)

OUTPUT

Terlaksanannya kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

Terlaksanannya Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah

Terlaksanannya Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Terlaksanannya Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta

Terlaksanannya Asistensi SPM

indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan asistensi SPM

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Seluruh Perangkat Daerah
2. BKPSDM
3. Bappeda
4. PD pemyelenggara Pelayanan Publik

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Seluruh PD : Selaku Pelaksana Pengendalian SPIP
2. BKPSDM : Selaku pendukung kegiatan bimtek
3. bappeda : Selaku Koordinator MR Tingkat Kota

INTERMEDIATE OUTCOME 8

Meningkatnya Penegakan Kompsi Perangkat Daerah

(IK : Prosentase PD dengan IEPK > 2,8)

INITIAL OUTCOME 9

Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Penegakan Kompsi Perangkat Daerah > 2,8

(IK : PD Dengan IEPK > 2,8)

OUTPUT

Terlaksanannya Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah

Terlaksanannya Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Terlaksanannya Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta

Terlaksanannya Asistensi SPM

indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan asistensi SPM

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Seluruh Perangkat Daerah
2. BKPSDM
3. Bappeda
4. PD pemyelenggara Pelayanan Publik

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Seluruh PD : Selaku Pelaksana Pengendalian SPIP
2. BKPSDM : Selaku pendukung kegiatan bimtek
3. bappeda : Selaku Koordinator MR Tingkat Kota

INTERMEDIATE OUTCOME 9

Mewujudkan penguasaan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan

IK :
Indikator :
Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan

INITIAL OUTCOME 10

Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan

IK :
Indikator :
1. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja

2. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Asurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

3. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi

4. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi

OUTPUT

Terlaksanannya Audit berbasis risiko pada kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

Terlaksanannya perdalam mandiri Kapabilitas APIP pada komponen Audit Kinerja

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan perdalam mandiri Kapabilitas APIP pada komponen Audit Kinerja

Terlaksanannya evaluasi regulasi pengawasan Perwal Kota, Kepwal Kota, & Kep Inspektur

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi regulasi pengawasan Perwal Kota, Kepwal Kota, & Kep Inspektur

Terlaksanannya telaah sejawat

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan telaah sejawat

Terlaksanannya telaah sejawat

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan telaah sejawat

CROSSCUTTING

NAMA PD

Bagian Hukum Setda

DUKUNGAN KEGIATAN

selaku Pelaksanaan evaluasi regulasi pengawasan Perwal Kota, Kepwal Kota, & Kep Inspektur

---

INTERMEDIATE OUTCOME 10

Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen :
1) Pengelolaan SDM
2) Praktek Profesional
3) Budaya & Hubungan Organisasi

IK :
Rata-rata Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi

INITIAL OUTCOME 11

Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen :
1) Pengelolaan SDM
2) Praktek Profesional
3) Budaya & Hubungan Organisasi

IK :
Rata-rata Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi

OUTPUT

Terlaksanannya pengembangan SIM pengawasan berbasis TI

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan SIM pengawasan berbasis TI

Terlaksanannya pengembangan kompetensi pegawai

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai

Terlaksanannya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain

CROSSCUTTING

NAMA PD

Internal Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

Data terkait :
1) Pengelolaan SDM
2) Praktek Profesional
3) Budaya & Hubungan Organisasi

INITIAL OUTCOME 12

Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen :
1) Praktek Profesional
2) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja
3) Struktur & tata Kelola

IK :
Indikator :
Rata-rata Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Akuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & tata Kelola

OUTPUT

Terlaksanannya perencanaan pengawasan berbasis risiko

Indikator :
jumlah dokumen pelaksanaan perencanaan pengawasan berbasis risiko

CROSSCUTTING

NAMA PD

Internal Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

Data terkait :
1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja
2) Struktur & tata Kelola

INTERMEDIATE OUTCOME 11

Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat Daerah

IK :
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat

INITIAL OUTCOME 13

Meningkatnya kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah

IK :
- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral Inspektorat Daerah

OUTPUT

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

IK :
Jumlah dokumen perencanaanan perangkat daerah

Terealisasinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

IK :
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen penelaahan RKA-SKPD

Terealisasinya Dokumen Penelaahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penelaahan RKA-SKPD

IK :
Jumlah dokumen penelaahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen penelaahan RKA-SKPD

Terealisasinya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

IK :
Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Tersusunnya Dokumen Penelaahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penelaahan DPA-SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Penelaahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penelaahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IK :
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK :
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. SAPPEDA
2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan

2. Pengawasan dan konsultasi

INTERMEDIATE OUTCOME 14

Meningkatnya ketersediaan statistik sektoral Inspektorat Daerah

IK : Persentase ketersediaan data statistik sektoral Inspektorat Daerah

OUTPUT

Tersedianya data statistik sektoral pengawasan

IK :
Jumlah data statistik sektoral pengawasan

CROSSCUTTING

NAMA PD

Dinas Kominfo

DUKUNGAN KEGIATAN

Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral

INTERMEDIATE OUTCOME 15

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Inspektorat Daerah

IK :
Nilai Pengunan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah

OUTPUT

Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN

IK :
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksanannya Pemanfaatan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

IK :
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Terlaksanannya Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

IK :
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

IK :
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

IK :
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. BPKAD
2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Penggangutan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset

2. Pengawasan dan konsultasi

INTERMEDIATE OUTCOME 16

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Inspektorat Daerah

Indikator :
Nilai Pengunan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah

OUTPUT

Terlaksanannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

IK :
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksanannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

IK :
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksanannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IK :
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksanannya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

IK :
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

IK :
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

IK :
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

IK :
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

IK :
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. BPKAD
2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Penggangutan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset

2. Pengawasan dan konsultasi

INTERMEDIATE OUTCOME 17

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Inspektorat Daerah

Indikator :
Hasil Penilaian Pengawasan Aerip Administrasi Umum Inspektorat Daerah

OUTPUT

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik,/Penerangan Bangunan Kantor

IK :
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik,/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

IK :
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

IK :
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

IK :
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

IK :
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IK :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Pengelolaan kearsipan
2. Pengawasan dan konsultasi

INTERMEDIATE OUTCOME 18

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah

Indikator :
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah

OUTPUT

Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

IK :
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber daya Manusia (BKPSDM)

2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

2. Pengawasan dan konsultasi

INTERMEDIATE OUTCOME 19

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa

Indikator :
Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIKaP Inspektorat Daerah

OUTPUT

Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

IK :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

IK :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

IK :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

CROSSCUTTING

NAMA PD

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah

DUKUNGAN KEGIATAN

1. Perumusan kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan

2. Pengawasan dan konsultasi

LAMPIRAN 2

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja ntuk Sasaran PD						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target Kinerja Program						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Opersional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa dienumerasikan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Seksi Yang mengampu indikator kegiatan	Tulis Nama Subkegiatan yang diambil dari Kepmen 050	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Seksi/Kelua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	
	INSPEKTORAT	Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	Indikator : 1. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP	Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas	1. Manajemen Risiko Indeks	Hasil penilaian SPIP pada komponen manajemen Risiko indeks oleh BPKP	3,466	3,516	3,566	3,716	3,815	3,896	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Rata-rata Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti = (prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti + prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti):2	Pemerintahan Aparatur & Investigasi	95,50%	96,00%	96,25%	97,00%	97,25%	97,50%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan	1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat = (Jumlah rekomendasi pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti : total rekomendasi pemeriksaan inspektorat) x 100%	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monitoring TLHP	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring TLHP	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	
			2. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) oleh KPK	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) oleh KPK		2. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Hasil penilaian SPIP pada komponen Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) oleh BPKP	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384													Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan	2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK = (Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti : total rekomendasi pemeriksaan BPK) x 100%	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monitoring TLHP	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring TLHP	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	
						3. Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 (3,14)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Rata-rata Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti = (prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti + prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti):2	Pemerintahan Aparatur & Investigasi	95,50%	96,00%	96,25%	97,00%	97,25%	97,50%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan	1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK = (Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti : total rekomendasi pemeriksaan BPK) x 100%	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	
																									2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK = (Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti : total rekomendasi pemeriksaan BPK) x 100%	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan pendapatan, belanja & pembiayaan	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan pendapatan, belanja & pembiayaan	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Reviu Pengelolaan Dana BOS	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu tata kelola BMD	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu tata kelola BMD	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu dokumen pengenggaran daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen penggaryaran daerah	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan terkait keuangan dan aset daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan terkait keuangan dan aset daerah	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu standar satuan harga/ analisa satuan	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu standar satuan harga/ analisa satuan	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terbloksanaya Reviu DAK dan DAU	Jumlah dokumen hasil reviu DAK dan DAU	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Pengawasan Keuangan dan Aset	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Revlu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & Aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	92,00%	96%	95,00%	96,6%	96,6%	96,6%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kepatuhan PD terhadap Penyelesaian Kerugian Keuangan & Aset	Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan	Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan = (Jumlah Kerugian yang dikembalikan : Jumlah Kerugian daerah yang muncul di tahun berjalan)x100%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi tim penyelesaian kerugian daera	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pendaran SPIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendaran SPIP Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPIP Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP Kota Yogyakarta	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi rencana tindak pengendalian perangkat daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Audit Dengan Tujuan Tertentu/Investigasi/Tematik	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu/Investigasi/Tematik	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Audit probiti	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit probiti	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksanaya monitoring barang/jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring barang/jasa	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (PD dengan nilai SPIP > 3,00 : Jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	61,90%	66,67%	71,43%	76,57%	85,71%	92,86%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00	PD Dengan Nilai SPIP 3,00	Jumlah PD SPIP Dengan SPIP Nilai 3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya reviu/evaluasi/ pemantauan tematik tertentu	Jumlah dokumen pelaksanaan Reviu reviu/evaluasi/ pemantauan tematik tertentu	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah PD) x 100%	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	64,29%	71,81%	83,33%	92,86%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah PD) x 100%	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	64,29%	71,81%	83,33%	92,86%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu terhadap laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu terhadap laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah PD) x 100%	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	64,29%	71,81%	83,33%	92,86%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Audit Kinerja	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit Kinerja	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah PD) x 100%	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	64,29%	71,81%	83,33%	92,86%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Audit Operasional	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit Operasional	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP >

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja (Aksi/Sasaran PD)						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target Kinerja Program						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Opersional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklator pengampu
								2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa di jm/angkan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran							Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen OSO	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program							Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen OSO	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Seksi Yang mengampu indikator kegiatan	Sub Kegiatan			Tulis Nama Seksi/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Fasilitasi sapu bersih pungutan liar	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi sapu bersih pungutan liar	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya fasilitasi sapu bersih pungutan liar Terlaksananya pelaksanaan whistle blowing system	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi sapu bersih pungutan liar Jumlah dokumen pelaksanaan whistle blowing system	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Penelitian dan penelaahan informasi Terlaksananya Pencegahan Korupsi	Jumlah dokumen pelaksanaan PPI Jumlah Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pencegahan Korupsi Terlaksananya Penilaian Zona Integritas perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan Jumlah dokumen penilaian pelaksanaan ZI PD	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Penilaian Zona Integritas perangkat Daerah	Jumlah dokumen penilaian pelaksanaan ZI PD	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya monev pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan monev pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pengendalian gratifikasi	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pengendalian gratifikasi Terlaksananya pengendalian benturan kepentingan	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian gratifikasi Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian benturan kepentingan	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : jumlah PD) x 100%.	Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi	11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%	19,05%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75	1. PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. PD dengan nilai RB > 85	1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pengendalian benturan kepentingan	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian benturan kepentingan	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Responsivitas PD	Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% = (Jumlah PD dengan tingkat responsivitas 90% : Jumlah PD) x 100%	Pengelolaan Keuangan & Aset	93,75%	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%	PD dengan tingkat responsivitas > 90%	Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Survey penilaian integritas	Jumlah dokumen jenis data populasi	Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Prosentase PD dengan nilai MRI>3,00 = (jumlah PD dengan nilai MRI >3,00 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	97,62%	97,62%	100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	PD Dengan Nilai MRI >3,00	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Prosentase PD dengan nilai MRI>3,00 = (jumlah PD dengan nilai MRI >3,00 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	97,62%	97,62%	100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	PD Dengan Nilai MRI >3,01	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Prosentase PD dengan nilai MRI>3,00 = (jumlah PD dengan nilai MRI >3,00 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	97,62%	97,62%	100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	PD Dengan Nilai MRI >3,02	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bimtek dan pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Prosentase PD dengan nilai MRI>3,00 = (jumlah PD dengan nilai MRI >3,00 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	97,62%	97,62%	100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	PD Dengan Nilai MRI >3,03	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Prosentase PD dengan nilai MRI>3,00 = (jumlah PD dengan nilai MRI >3,00 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	97,62%	97,62%	100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	PD Dengan Nilai MRI >3,04	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Asistensi SPMI	Jumlah Dokumen pelaksanaan Asistensi SPMI	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 = (jumlah PD dengan IEPK > 2,8 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	76,19%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah > 2,8	PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD Dengan IEPK >2,8	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya legiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
															Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Prosentase PD dengan IEPK >2,8	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 = (jumlah PD dengan IEPK > 2,8 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	76,19%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah > 2,8	PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD Dengan IEPK >2,8	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan SPIP Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
															Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Prosentase PD dengan IEPK >2,8	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 = (jumlah PD dengan IEPK > 2,8 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	76,19%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah > 2,8	PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD Dengan IEPK >2,8	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bimtek dan pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
															Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Prosentase PD dengan IEPK >2,8	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 = (jumlah PD dengan IEPK > 2,8 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	76,19%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah > 2,8	PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD Dengan IEPK >2,8	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Pendampingan Manajemen Risiko Tingkat Kota	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
															Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Prosentase PD dengan IEPK >2,8	Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 = (jumlah PD dengan IEPK > 2,8 : jumlah PD) x 100%	Pembangunan Sarana & Prasarana	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	76,19%	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan nilai Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah > 2,8	PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD Dengan IEPK >2,8	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	Pendampingan dan Asistensi Uraian Penerintahan Daerah	Terlaksananya Asistensi SPMI	Jumlah Dokumen pelaksanaan Asistensi SPMI	Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	
			1. Manajemen Risiko Indeks	Hasil penilaian SPIP pada komponen manajemen Risiko Indeks oleh BPKP	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,896	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menwujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan kayakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan oleh BPKP	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada komponen Audit Ketaatan	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada komponen Audit Ketaatan	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
			2. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Hasil penilaian SPIP pada komponen Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (EPK) oleh BPKP	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menwujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan kayakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja oleh BPKP	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya evaluasi regulasi pengawasan Perwal Kota, Kepwal Kota, & Kep Inspektur	Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi regulasi pengawasan Perwal Kota, Kepwal Kota, & Kep Inspektur	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
			3. Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menwujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan kayakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja, dan Pengendalian Intern	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Asuransi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern oleh BPKP	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya telaah sejawat	Jumlah dokumen pelaksanaan telaah sejawat	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
														PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menwujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan kayakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi oleh BPKP	Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	Perumuan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya telaah sejawat	Jumlah dokumen pelaksanaan telaah sejawat	Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	
			1. Manajemen Risiko Indeks	Hasil penilaian SPIP pada komponen manajemen Risiko Indeks oleh BPKP	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,896	PROGRAM PENGUNGKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Jumlah Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) = Nilai elemen Pengelolaan SDM + nilai elemen Praktek Profesional + nilai elemen Akuntabilitas & Manajemen Kinerja + nilai elemen Budaya & Hubungan Organisasi + nilai elemen Struktur & tata Kelola	Sekretariat	1,90	2,08	2,1	2,14	2,18	2,22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organisasi	Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi	Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM + Nilai Praktek Profesional + Nilai Budaya & Hubungan Organisasi	Sekretaris	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pengembangan SIM pengawasan berbasis TI	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan SIM pengawasan berbasis TI	Sekretaris /Subbag Umpeg	
			2. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Hasil penilaian SPIP pada komponen Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (EPK) oleh BPKP	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384	PROGRAM PENGUNGKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Jumlah Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) = Nilai elemen Pengelolaan SDM + nilai elemen Praktek Profesional + nilai elemen Akuntabilitas & Manajemen Kinerja + nilai elemen Budaya & Hubungan Organisasi + nilai elemen Struktur & tata Kelola	Sekretariat	1,90	2,08	2,1	2,14	2,18	2,22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organisasi	Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi	Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM + Nilai Praktek Profesional + Nilai Budaya & Hubungan Organisasi	Sekretaris	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain	Sekretaris /Subbag Umpeg	
			3. Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)	PROGRAM PENGUNGKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organisasi 5) Struktur & tata Kelola	Jumlah Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) = Nilai elemen Pengelolaan SDM + nilai elemen Praktek Profesional + nilai elemen Akuntabilitas & Manajemen Kinerja + nilai elemen Budaya & Hubungan Organisasi + nilai elemen Struktur & tata Kelola	Sekretariat	1,90	2,08	2,1	2,14	2,18	2,22	Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola	Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enab

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja (Nilai/Sasaran PD)						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target Kinerja Program						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Opersional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
1	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD (boleh berbeda dgn sasaran jika bisa di(en)angkan)	Tulis Indikator Kinerja Tujuan /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator tujuan	Tulis Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Ultimate Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepmen OSO	Tulis Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Program /Intermediate Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator program	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepmen OSO	Tulis Sasaran Kegiatan /Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Initial Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Sekto Yang mengampu indikator kegiatan	Tulis Nama Subkegiatan yang diambil dari Kepmen OSO	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Sekto/Ketua Tim Kerja Yang mengampu indikator subkegiatan	
					Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	AA (91,304)	AA (91,388)	AA (91,386)	AA (91,388)	AA (91,388)	AA (91,388)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris	Nilai A (89,23)	Nilai A (89,4)	Nilai A (89,6)	Nilai A (89,8)	Nilai A (90,00)	Nilai A (90,00)	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	1. Persentase ketersediaan pengusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah.	**1.Jumlah penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang disusun dibagi jumlah penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang dipersyaratkan**	**Sekretaris**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																									2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah.	**2. Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																2. Nilai SPIP Inspektorat Daerah	Hasil Penilaian SPIP Inspektorat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Sekretaris	4,52	4,5	4,55	4,6	4,65	4,7						**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																3. Nilai IKM Inspektorat Daerah	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretaris	89,91	89,93	89,95	89,95	89,95	89,97						**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
																							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai Pengusatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah.	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah oleh BPKAD**	**Sekretaris**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunkeman ASN	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																										Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	**Kepala Sub Bagian Keuangan**	
																							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Pengusatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah.	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah oleh BPKAD**	**Sekretaris**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Pengusatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah.	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah oleh BPKAD**	**Sekretaris**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Pengusatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah.	**Hasil penilaian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah oleh BPKAD**	**Sekretaris**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah.	**Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Sekretaris**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah	**Hasil nilai IP ASN Inspektorat Daerah oleh SKPDM**	**Sekretaris**	**Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai**	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah.	**Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah**	**Sekretaris**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
																										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwadahkan	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	

LAMPIRAN 3

DATA KINERJA

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1. Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	**Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	Nilai atas sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	[redacted]			Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP	Level	3,397 (Level 3)	3,477 (Level 3)	3,557 (Level 3)	3,627 (level 3)	3,697 (Level 3)	3,757 (Level 3)	3,757 (Level 3)	3,817 (Level 3)	TRUE
						Sumber Data :										
						Hasil penilaian SPIP oleh BPKP Perwakilan DIY	Level	3,397 (Level 3)	3,477 (Level 3)	3,557 (Level 3)	3,627 (level 3)	3,697 (Level 3)	3,757 (Level 3)	3,757 (Level 3)	3,817 (Level 3)	TRUE
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP)	indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah di Indonesia				Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) oleh KPK **yang terdiri dari area intervensi :** 1. Perencanaan 2. Pengadaan Barang dan jasa 3. Pengawasan APIP 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Penganggaran 6. Pelayanan Publik 7. Manajemen ASN 8. Optimalisasi Pajak	nilai	95,01	95,01	95,1	95,2	95,4	95,45	95,45	95,5	TRUE
						Sumber Data :										
						Hasil Pengendalian Intern Pemerintah KPK oleh KPK	nilai	95,01	95,01	95,1	95,2	95,4	95,45	95,45	95,5	TRUE
	[redacted]		**1.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas**	**Manajemen Risiko Indeks**	Penilaian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan Efektivitas dan efisiensi operasional, Keandalan pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan	Hasil penilaian SPIP pada komponen manajemen Risiko Indeks oleh BPKP	nilai	3,366	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,816	3,896	TRUE
						Sumber Data :										
						Nilai komponen manajemen Risiko Indeks oleh BPKP	nilai	3,366	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,816	3,896	TRUE
				Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi, lembaga, atau pemerintah daerah telah menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Indeks ini tidak hanya menilai keberadaan kebijakan, tetapi juga efektivitas	Hasil penilaian SPIP pada komponen Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) oleh BPKP	nilai	2,964	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,324	3,384	TRUE
						Sumber Data :										
						Nilai komponen Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) oleh BPKP	nilai	2,964	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,324	3,384	TRUE
				Nilai Kapabilitas APIP	mengacu pada tingkat kematangan atau kemampuan unit	Nilai Kapabilitas APIP oleh BPKP	nilai	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)	TRUE

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030	
					pengawasan intern pemerintah dalam menjalankan fungsinya	Sumber Data :										TRUE
						Hasil evaluasi atas nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta oleh BPKP		Level 3 (3,19)	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)	TRUE
			1.2 Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif	**Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah**		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah	nilai	AA (91,384)	AA (91,384 - 94)	AA (91,684 - 94)	AA (91,984 - 94)	AA (92,284 - 95)	AA (92,584 - 95)	AA (92,584 - 95)	AA (92,584 - 95)	TRUE
					mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Sumber Data :										TRUE
						Hasil penilaian RB Inspektorat Daerah oleh Inspektorat Daerah dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Inspektorat Daerah 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks	nilai	AA (91,384)	AA (91,384 - 94)	AA (91,684 - 94)	AA (91,984 - 94)	AA (92,284 - 95)	AA (92,584 - 95)	AA (92,584 - 95)	AA (92,584 - 95)	TRUE
						--> Rekomendasi		**91,348**	**91,384-94**	**91,684-94**	**91,984-94**	**92,284-95**	**92,584-95**	**92,584-95**	**92,584-95**	

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030
1.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas	**1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola					Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola	Nilai	1,99	1,99	2,08	2,1	2,14	2,18	2,18	2,22
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian oleh BPKP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola		1,99	1,99	2,08	2,1	2,14	2,18	2,18	2,22
					1.1.1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organsiasi**	**Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organsiasi**	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organsiasi	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organsiasi	Nilai	1,41	**1,39**	**1,48**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian oleh BPKP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Budaya & Hubungan Organsiasi	Nilai	1,41	**1,39**	**1,48**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
					1.1.1.2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Dukungan Kapabilitas APIP Pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola**	**Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Akuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & Tata Kelola**	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada KomponenAkuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & Tata Kelola	Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola	Nilai	0,6	0,6	0,6	0,6	**0,64**	**0,68**	**0,68**	**0,72**
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian oleh BPKP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 2) Struktur & tata Kelola		0,6	0,6	0,6	0,6	**0,64**	**0,68**	**0,68**	**0,72**
	1.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan**	**Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal**	mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)						Rata-rata Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti = (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal + Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal):2	Persen	100	95,5	96	96,25	97	97,25	97,25	97,5
									Sumber Data :		0,00	95,50	96,00	96,25	97,00	97,25	97,25	97,50
									Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	persen		96	97	97	98	98	98	98
									Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	persen		95	95	95,5	96	96,5	96,5	97
					1.1.2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Kepatuhan PD terhadap Pemeriksaan**	**1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat**	mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat = (Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti : Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat) x 100%	Persen	100%	**95,56**	**97,50**	**97,14**	**98,33**	**83,05**	**83,05**	**97,50**
									Sumber Data :		100,00	95,56	97,50	97,14	98,33	83,05	83,05	97,50
									1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti		107	86	78	68	59	49	49	39
									2. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat		107	90	80	70	60	59	59	40
							2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang	2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK = (Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti : total rekomendasi pemeriksaan BPK) x 100%	Persen	100%	94,74	94,74	94,44	97,06	96,88	96,88	96,67
									Sumber Data :		100,00	94,74	94,74	94,44	97,06	96,88	96,88	96,67
									1. Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		96	36	36	34	33	31	31	29
									2. total rekomendasi pemeriksaan BPK		96	38	38	36	34	32	32	30
		Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset**	mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan pada Perangkat Daerah pengampu pengelolaan Keuangan dan Aset						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = (Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & aset Yang Ditindaklanjuti : Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset) x 100%	Persen	100,00	92,31	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65
									Sumber Data :		100,00	92,31	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65
									Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & aset Yang Ditindaklanjuti		26	24	22	22	22	22	22	22
									Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset		26	26	23	23	23	23	23	23
					1.1.2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Kepatuhan PD terhadap Pengawasan Keuangan & Aset	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset	mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi saran yang diberikan oleh APIP setelah	Persentase Penyelesaian saran terkait Keuangan & Aset = (Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti : Jumlah saran terkait keuangan dan aset) x 100%	Persen	100%	97,07%	98,17%	98,52%	98,88%	99,25%	99,25%	99,62%
									Sumber Data :		100,00	97,07	98,17	98,52	98,88	99,25	99,25	99,62

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
											Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan dan aset	1. Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti		273	265	268	266	265	263	263	264
									2. Jumlah saran terkait keuangan dan aset		273	273	273	270	268	265	265	265
					1.1.2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2. Kepatuhan PD terhadap Penyelesaian Kerugian Keuangan & Aset	-Persentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan	mengukur sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran dapat dikembalikan atau dipulihkan kembali	**Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan = (Jumlah kerugian yang dikembalikan : jumlah kerugian daerah yang muncul di tahun berjalan)x100%**	Persen	**100,00**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
									Sumber Data :		100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									1. Jumlah kerugian yang dikembalikan		7	6	6	6	6	5	5	5
									2. jumlah kerugian daerah yang muncul di tahun berjalan		7	7	6	6	6	5	5	5
		Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah	**Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00**	Mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai perolehan SPIP 3,00					Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Persen	**57,14**	**61,90**	**66,67**	**71,43**	**78,57**	**85,71**	**85,71**	**92,86**
									Sumber Data :		57,14	61,90	66,67	71,43	78,57	85,71	85,71	92,86
									Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern		24	26	28	30	33	36	36	39
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		42	42	42	42	42	42	42	42
					1.1.2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Meningkatnya PD SPIP Dengan Nilai 3,00**	**Jumlah PD Dengan Nilai SPIP 3,00**	Nilai ukuran sejauh mana pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah telah berjalan dengan	umlah PD dengan nilai Nilai SPIP 3,00 hasil penilaian Inspektorat	Perangkat Daerah	24	**26**	**28**	**30**	**33**	**36**	**36**	**39**
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan nilai Nilai SPIP 3,00 hasil penilaian Inspektorat	Perangkat Daerah	24	26	28	30	33	36	36	39
		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0**	Mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu melaksanakan dan mengelola akuntabilitas kinerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan perolehan nilai >86,00					**Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%**	Persen	54,76	64,29	73,81	83,33	92,86	100,00	100,00	100,00
									Sumber Data :		54,76	64,29	73,81	83,33	92,86	100,00	100,00	100,00
									Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0		23	27	31	35	39	42	42	42
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		42	42	42	42	42	42	42	42
					1.1.2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Meningkatnya Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0**	**Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0**	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP >86,00	**Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0**	Jumlah	23	27	31	35	39	42	42	42
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0		23	27	31	35	39	42	42	42
	1.1.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah**	**Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM**	Mengukur kemampuan instansi pemerintah yang berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat dengan baik					**Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (Jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : Jumlah Seluruh Peranokat Daerah) x 100%**	Persen	9,52	11,90	11,90	14,29	14,29	16,67	16,67	16,67
									Sumber Data :		9,52%	11,90%	11,90%	14,29%	14,29%	16,67%	16,67%	16,67%
									Jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM		4	5	5	6	6	7	7	7
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		42	42	42	42	42	42	42	42
					1.1.3.1 Pendampingan dan Asistensi	**Meningkatnya PD dengan Nilai ZI Minimal 75**	**Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75**	Jumlah PD dengan nilai kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas instansi	**1. Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75**	Jumlah	7	7	7	7	8	8	8	8
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan nilai ZI minimal 75 hasil dari penilaian ZI oleh Inspektorat		7	7	7	7	8	8	8	8
							Jumlah PD dengan nilai RB > 85	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan	**2. Jumlah PD dengan nilai RB > 85**	Jumlah	41	42	42	42	42	42	42	42
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan nilai RB >85 hasil dari penilaian RB oleh Inspektorat		41	42	42	42	42	42	42	42
		Meningkatnya Responsivitas PD	**Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%**	Mengukur sejauh mana nilai-nilai integritas seperti kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas diterapkan dalam lingkungan organisasi atau pemerintahan melalui Survey Penilaian Integritas					Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% = (Jumlah PD dengan tingkat responsivitas 90% : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Persen	100	93,75	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Sumber Data :		100,00%	93,75%	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas >90%		16	15	15	16	16	16	16	16
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		16	16	16	16	16	16	16	16
					1.1.3.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Meningkatnya Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%**	**Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%**	Prosentase tingkat kecepatan PD dalam menanggapi aduan di PD tersebut dengan dengan nilai >90%	**Jumlah PD dengan tingkat responsivitas > 90%**	Jumlah	16	15	15	16	16	16	16	16
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan tingkat responsivitas >90		16	15	15	16	16	16	16	16
		Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1. Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Mengukur sejauh mana suatu organisasi, instansi, atau perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang dihadapi					Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 = (jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00 : Jumlah PD) x 100%	Persen	97,61	97,62	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Sumber Data :		97,62%	97,62%	97,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00		41	41	41	42	42	42	42	42
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		42	42	42	42	42	42	42	42
					1.1.3.1 Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai MRI >3,00	Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00	Jumlah PD yang mendapat nilai hasil mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang	**1. Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00**	Jumlah	41	**41**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan nilai MRI > 3,00 dari Penilaian MRI oleh Inspektorat		41	**41**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**
		Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	2. Persentase PD dengan IEPK > 2,8	Mengukur sejauh mana suatu PD dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan negara					Persentase PD dengan IEPK > 2,8 =(jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8 : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Persen	47,62	52,38	57,14	61,90	66,67	71,43	71,43	76,19
									Sumber Data :		47,62%	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	71,43%	76,19%
									jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8		20	22	24	26	28	30	30	32

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
											Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
									Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		42	42	42	42	42	42	42	42
					1.1.3.1. Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah PD dengan Nilai IEPK >2,8	Jumlah PD Dengan IEPK > 2,8	Jumlah PD yang telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, terutama dalam pengelolaan	**2. Jumlah PD Dengan IEPK > 2,8**	Jumlah	20	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**	**30**	**32**
									Sumber Data :									
									Jumlah PD dengan nilai IEPK > 2,8 dari Penilaian IEPK oleh Inspektorat		20	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**	**30**	**32**
		Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Aktifitas dan					Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Nilai	1,2	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP		1,2	1,2	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22
					1.1.3.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Meningkatnya Kapabilitas APIP Pada Elemen Peran dan Layanan**	**1. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan**	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi	**Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan oleh BPKP**	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan oleh BPKP		3	3	3	3	3	3	3	3
							2. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi	**Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja oleh BPKP**	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja oleh BPKP	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
							3. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola,	**Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern oleh BPKP**	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern oleh BPKP		3	3	3	3	3	3	3	3
							4. Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi	Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi	**Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi oleh BPKP**	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
									Sumebr Data :									
									Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi oleh BPKP		3	3	3	3	3	3	3	3
1.2 Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Baik dan Adaptif	**1.2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90)					Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A(89,25)	A (89,250)	A (89,400)	A (89,600)	A (89,800)	A (90,000)	A (90,000)	A (90,000)
									Sumber data :									
									Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah		A(89,25)	A (89,250)	A (89,400)	A (89,600)	A (89,800)	A (90,000)	A (90,000)	A (90,000)
			2. Nilai SPIP Inspektorat Daerah	Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00						Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	4,514	4,520	4,530	4,550	4,600	4,650	4,650	4,700
									Sumber data :									
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat Nilai maturitas SPIP Inspektorat Daerah: 1. Penetapan tujuan 2. Struktur & proses 3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP		4,514	4,520	4,530	4,550	4,600	4,650	4,650	4,700
			3. Nilai IKM Inspektorat Daerah	mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik					Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,91	89,91	89,93	89,95	89,95	89,97	89,97	89,97
									Sumber data :									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		89,91	89,91	89,93	89,95	89,95	89,97	89,97	89,97
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah	Mengukur prosentase penyelesaian dokumen Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Persesntase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah = (Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang disusun : Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang direncanakan)*100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber Data :		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang disusun	dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7
									Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang direncanakan	dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7
							2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah	Mengukur ketercapaian atas ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	Persen	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
									Sumber Data :									
									Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Data	**81**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**
									Jumlah Data statistik sektoral	Data	**81**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**	**152**
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah**	Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Target
											Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah**	Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah**	Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aset**	**Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah**	Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum**	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah**	Mengukur nilai pengawasan arsip administrasi umum	**Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	Nilai	80,51	**80,51**	**80,52**	**80,53**	**80,54**	**80,55**	**80,55**	**80,56**
									Sumber Data :									
									Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		91,31	**91,31**	**91,32**	**91,33**	**91,34**	**91,35**	**91,35**	**91,36**
					1.2.1.7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah**	**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah**	Mengukur tingkat Profesionalitas ASN sesuai indikatornya	**Hasil nilai IP ASN Inspektorat Daerah oleh BKPSDM**	Nilai	80,51	**81,51**	**82,51**	**83,51**	**84,51**	**85,51**	**85,51**	**86,51**
									Sumber Data :									
									Hasil nilai IP ASN Inspektorat Daerah oleh BKPSDM		80,51	**81,51**	**82,51**	**83,51**	**84,51**	**85,51**	**85,51**	**86,51**
					1.2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**	**Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah**	Persentase rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan rencana pengadaan	Jumlah belanja Inspektorat Daerah yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Inspektorat Daerah dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber Data :									
									Jumlah belanja Inspektorat Daerah yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	##########	3.820.853.055	3.062.967.505	##########	3.307.504.889	3.397.435.976	3.397.435.976	##########
									Jumlah belanja pada DPA Inspektorat Daerah	Rupiah	##########	3.820.853.055	3.062.967.505	##########	3.307.504.889	3.397.435.976	3.397.435.976	##########

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN TEGALREJO
2025 - 2029

Jalan Tompeyan TR III/219, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 515781; Faksimile (0274) 515781
Laman tegalrejokec.jogjakota.go.id; Pos-el tr@jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2025 – 2029

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kemantren dan Kelurahan, ditegaskan bahwa Kemantren merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kemantren dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berlandaskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh karena itu, Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan, dengan memperhatikan faktor pendukung maupun penghambat, baik dari internal maupun eksternal.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta target kinerja Kemantren, baik dalam urusan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kemasyarakatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi acuan Kemantren Tegalrejo dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada periode 2025–2029.

Yogyakara, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN TEGALREJO

Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si.

NIP. 196908021989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1. Latar Belakang ..... I - 1

1.2. Landasan Hukum ..... I - 5

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 8

1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... II - 1

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... II – 1

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Tegalrejo ..... II – 1

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... II – 17

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II – 26

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kemantren Tegalrejo ..... II – 34

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan ..... II - 34

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... II – 37

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan II – 37

2.2.2. Isu Strategis ..... II - 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAHAN KEBIJAKAN ..... III - 1

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..... III - 1

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2025 - 2029 ..... III – 2

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan ..... III – 5

3.1.1. Penahapan Pembangunan ..... III – 6

3.3.2. Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah ..... III – 10

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis 2025 – 2029..... III - 11

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... IV – 1

4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan .....IV – 1

4.2. Program Prioritas.....IV – 48

4.3. Indikator Kinerja Utama.....IV – 56

4.3.1. Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo.....IV – 64

4.3.2. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo IV – 64

4.3.3. Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo..... IV - 66

BAB V PENUTUP..... V - 1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 KETERSEDIAAN APARATUR DAN ANALISIS JABATAN ……..II - 18

TABEL 2.2 JUMLAH PNS MENURUT FORMASI ……..II - 19

TABEL 2.3 DATA PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN ……..II - 21

TABEL 2.4 DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON ……..II - 21

TABEL 2.5 DATA SARANA DAN PRASARANA KEMANTREN TEGALREJO…II - 22

TABEL 2.6 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA…… II - 29

TABEL 2.7 TEKNIS MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH……II - 39

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN KEMANTREN TEGALREJO PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTAPERANGKAT DAERAH……..III - 4

TABEL 3.2 PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH…….III – 7

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH……..III - 12

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH…….IV – 7

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH…….IV - 26

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH……..IV - 52

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMANTREN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA……..IV - 63

TABEL 4.5 KATEGORI DAN PREDIKAT NILAI REFORMASI BIROKRASI……IV- 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian, Walikota Kota Yogyakarta hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk periode tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo selama empat tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kemantren Tegalrejo yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo .
   Tahap ini dilakukan dengan:

a) Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kemantren Tegalrejo dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural Kemantren Tegalrejo.
b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kemantren ,
c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo. Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kemantren Tegalrejo yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : 100.3.4/1561 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kemantren Tegalrejo menjadi rancangan akhir Renstra Kemantren Tegalrejo dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Kemantren Tegalrejo disusun dengan sistematika:

I.	Pendahuluan;
II.	Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
III.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
IV.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
V.	Penutup

5. Rancangan akhir Renstra Kemantren Tegalrejo disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kemantren Tegalrejo untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH

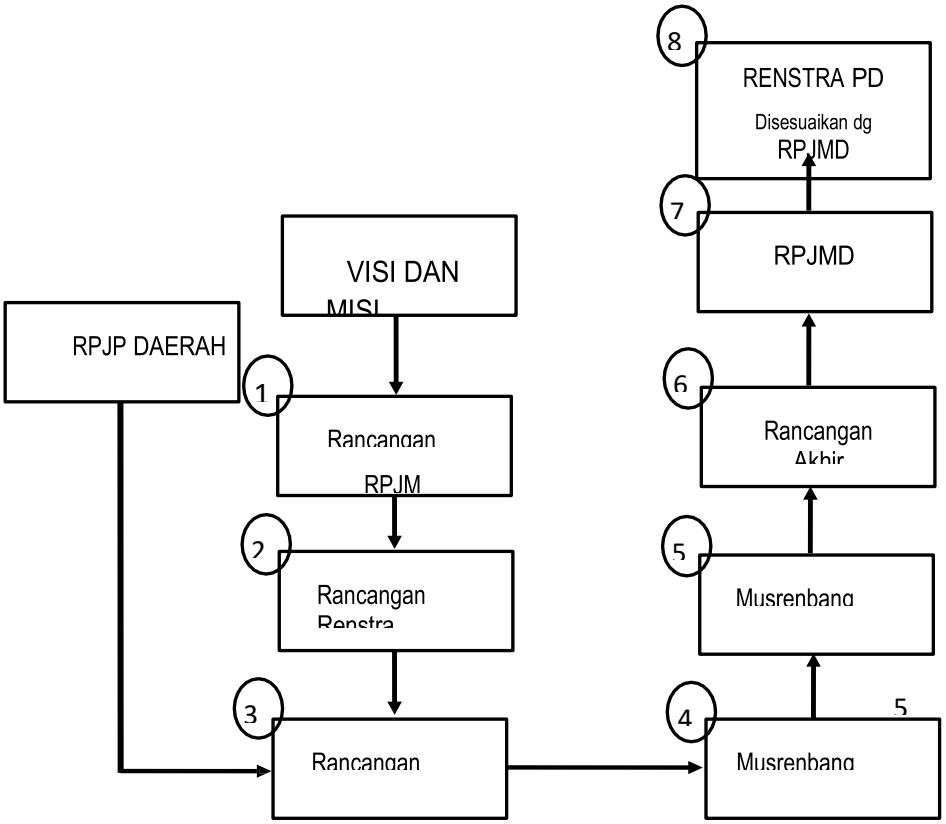

Selain itu dalam penyusunan rencana strategis Kemantren Tegalrejo Tahun 2025-2029 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunannya harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.
8. Menggunakan nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Yogyakarta dari aspek Keberdayaan Masyarakat dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025 – 2029 yang akan diselesaikan oleh Kemantren Tegalrejo.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo adalah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kemantren Tegalrejo dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo juga bertujuan untuk menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Tegalrejo untuk periode tahun 2025 – 2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo akan menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan Kemantren Tegalrejo dalam jangka 5 tahun (2025-2029), menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan rencana kerja yang bersifat tahunan serta sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
3.1 Tujuan
3.2 Sasaran
3.3 Strategi
3.4 Arah Kebijakan
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Tegalrejo

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan di masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai

kewenangan Kemantren;

j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
m. Pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

A. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

   Susunan Organisasi Kemantren terdiri atas :

   a. Mantri Pamong Praja ;
   b. Mantri Anom, terdiri atas :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Jawatan Praja;
   d. Jawatan Keamanan;
   e. Jawatan Kemakmuran;
   f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Umum.

Mantri Pamong Praja mempunya tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren, dan mempunya fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. penerbitan dokumen perizinandan / atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat kemantren;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

B. Mantri Anom memiliki tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
    2. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
    3. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;
    4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
    5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
    6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
    7. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
    8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
    9. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
    10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada sekretariat Kemantren;

11. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat Kemantren;
12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
13. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Mantri Anom membawahi dua Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut:
    1. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
    3. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
    4. pengelolaan aset Kemantren;
    5. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
    6. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
    7. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
    8. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
    9. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
    10. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;

11. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
12. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
13. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
14. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
15. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah:
    1. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    3. penatausahaan keuangan Kemantren;
    4. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
    5. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
    6. pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban keuangan Kemantren;
    7. penyusunan pertanggung jawaban keuangan Kemantren;
    8. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
    9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
    10. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;

11. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
12. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
13. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. pengelolaan arsip Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
15. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
16. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
   1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
   2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   3. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren;
   4. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren;
   5. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota

di bidang tugasnya;

6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
7. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
8. penyiapan bahan penetapan kepengurusan rukun tetangga, rukun warga, pengurus kampung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
9. pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan rukun tetangga, rukun warga, pengurus kampung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
10. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
11. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
12. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
13. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tataruang di tingkat Kemantren;
14. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pemerintahan;
15. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
16. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
17. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
18. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d aerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
2. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangannya;
4. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
5. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
6. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang keamanan dan ketertiban;
7. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pembinaan PKL di tingkat Kemantren;
8. pengawasan dan penindakan PKL di wilayah Kemantren secara represif non yustisi;
9. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
10. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
11. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
12. pelaksanaan pengawasan dan tindakan non yustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
13. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
14. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan

Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

15. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
16. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
18. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
19. perencanaan, penentuan titik lokasi, pengadaan dan pemasangan cermin tiikungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
20. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
21. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
22. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
23. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
24. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

3. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang tugasnya;
4. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
5. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
7. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
8. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
9. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
10. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
11. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
12. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umumdi wilayah Kemantren;
13. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
14. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
15. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
16. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
17. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
18. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;

19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
    2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
    3. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
    4. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    5. pengoordinasian pembinaan teknis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
    6. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
    7. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
    8. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
    9. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang tugasnya;
    10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    11. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
    12. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di

wilayah Kemantren;

13. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
14. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
15. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
16. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
17. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
18. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
19. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
20. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
   2. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   3. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   4. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   5. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota

di bidang pelayanan umum;

6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pelayanan umum;
7. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
8. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
9. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
10. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
11. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
12. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
13. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
14. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
15. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
16. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Tegalrejo sebagai Kemantren tipe B mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Bagan 1. Susunan Organisasi Kemantren Tegalrejo

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Tegalrejo tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
2. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Mantri Anom adalah sebutan dari Sekretaris Kemantren.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Jawatan Praja adalah sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.
8. Jawatan Keamanan adalah sebutan dari Seksi Ketentraman dan

Ketertiban.

9. Jawatan Kemakmuran adalah sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
10. Jawatan Sosial adalah sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.
11. Jawatan Umum adalah sebutan dari Seksi Pelayanan Umum.
12. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya, sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kemantren maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kemantren Tegalrejo yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 49 orang pegawai, terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan telah memetakan nama dan klasifikasi jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemantren dan kelurahan, tentunya agar hasil kinerja perangkat daerah menjadi optimal. Berikut ini tabel ketersediaan aparatur dan analisis jabatan yang ada :

TABEL 2.1

KETERSEDIAAN APARATUR DAN ANALISIS JABATAN

NO	Uraian	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV
1.	Mantri Pamong Praja	1	1	-	-	-	1
2.	Mantri Anom	1	-	1	-	-	1
3.	Kepala Jawatan	5	2	3	-	3	2
4.	Kasubag	2	1	1	-	2	-
5.	Jabfung Umum Kec.	8	4	4	5	3	-
6.	Lurah	4	3	1	-	4	-
7.	Seklur	4	1	3	-	4	-
8.	Kasi Kelurahan	12	10	2	-	12	-
10.	PJLOP	12	7	5	-	-	-
	Jumlah	49	29	20	5	28	4

NO	Jenis Diklat	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	1	1
2	Diklatpim IV	15	5	10
3	Adum	8	4	4
4	Spada	0	0	0
5	Struktural yang belum Diklat Penjenjangan	1	1	0

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Jenis Kelamin sumber daya manusia di Kemantren Tegalrejo sudah mulai imbang antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki. Sedangkan pegawai yang belum diklat seperti data terlampir Karena tuntutan kewajiban dari ikatan kedinasan, maka produktifitas tetap harus dibangun sebagai modal utama pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran perangkat daerah.

Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2

JUMLAH PNS MENURUT FORMASI

N O	JABATAN	FORMASI	KONDISI	PANGKAT	ESELON
		2025	2025	2025	2025
1.	MPP	1	1	IV/b	III – A
2.	Manom	1	1	IV/a	III – B
3.	Kasubbag	2	2	III/b	IV - B

4.	Ka.Jawatan Kemantren	5	5	III/d, IV/a	IV - A
5.	Lurah	4	4	III/d,	IV - A
6.	Sekretaris Kel	4	4	III/c, III/d	IV – B
7.	Ka.Seksi Kel.	12	12	III/b, III/c, III/d	IV - B
8.	Staf Kec.	8	8	III/a, II/d, II/c, II/a	-
9.	Staf Kel.	-	-	-	-
	Jumlah	**37**	**37**	-	-

TABEL 2.3
DATA PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	6	3	3
2	S1	17	8	8
3	D III	10	5	5
4	SLTA	7	6	1
5	SLTP	0	-	-
6.	SD	1	1	-
	Jumlah	37	22	15

TABEL 2.4.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	9	5	4
4	IV B	18	12	6

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung di kemantren dan kelurahan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang Kerja Pegawai kemantren yang cukup panas tidak ada AC dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Tegalrejo .

TABEL 2.5

DATA SARANA DAN PRASARANA KEMANTREN TEGALREJO

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	Baik
2.	Pendopo (Kemantren dan kelurahan)	2	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
3.	Rumah Dinas Mantri pamong praja	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	4	3 Kelurahan Gedung baik, 1 Gedung Kel. Kricak sedang direnovasi
5	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 3 (Kemantren)	1	Baik
7	Genset	-	Tidak Ada
8	Pompa Air	5	Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kemantren + Kelurahan)	16	13 Baik, 3 Rusak Berat
10	Sound System (Kemantren + Kelurahan)	9	6 Baik, 3 Rusak Ringan
11	Sepeda Manual	6	1 Baik, 5 Rusak Ringan
12	Komputer PC	60	48 Baik, 12 Rusak Ringan
13	Printer	27	19 Baik, 8 Rusak Ringan
14	Laptop	6	Baik
15	Rak Besi	6	Baik
16	Sprayer – Hand Sprayer	14	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
17	Mesin Ketik	1	Baik
18	Mesin Finger Print	1	Baik
19	Lemari Besi	15	12 Baik, 3 Rusak Ringan
20	Rak Besi	10	8 Baik, 2 Rusak Ringan
21	Filling Cabinet	34	24 Baik, 10 Rusak Ringan
22	Filling Kayu	13	7 Baik, 6 Rusak Ringan
23	Brangkas	1	Baik
24	Lemari Sorok	1	Baik
25	Kursi Sidang/Rapat Susun	269	Baik
26	Kursi Tunggu Pelayanan	7	2 Baik, 5 Rusak Ringan
27	TV	5	Baik
28	Infrared Thermometer	5	Baik
29	HT	10	Baik
30	Kursi Lipat	355	328 Baik, 27 Rusak Ringan
31	Tabung Gas	2	Baik
32	Kompor Gas	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
33	Air Purifier	5	Baik
34	Kipas Angin	26	21 Baik, 5 Rusak Ringan
35	AC	20	Baik
36	Jam Dinding	5	2 Baik, 3 Rusak Ringan
37	Rak Koran	5	Baik
38	Karpet Mushola	20 Meter	Baik
39	Meja ½ Biro	28	12 Baik, 16 Rusak Ringan
40	Meja Komputer	14	12 Baik, 2 Rusak Ringan
41	Papan Nama Instansi	5	Baik
42	Meja Tulis	10	Baik
43	Meja Pelayanan	4	Baik
44	Running Text	2	Baik
45	Layar LCD	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
46	Springbed	2	baik
47	Papan Pengumuman	1	Baik
48	Dispenser	5	baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
49	Rambu Portabel	8	baik
50	Rambu Lalin	60	baik
51	Lemari Kayu	17	Baik
52	Meja Kerja	50	48 Baik, 2 Rusak Ringan
53	Kursi Besi/Kursi Susun	562	Baik
54	Kursi Tamu	4	Baik
55	Lemari Es	1	Baik
56	Kendaraan Operasional BKO	1	Baik
57	Kardex Besi/ Kayu	3	1 Baik, 2 Rusak
58	Lemari Kaca	20	13 Baik, 7 Rusak Ringan
59	Amplifier	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
60	White Board	11	8 Baik, 3 Rusak Ringan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Tegalrejo sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam Renstra Periode 2023-2026 dalam rangka mendukung urusan tersebut ditetapkan dua tujuan

Kemantren Tegalrejo yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo. Pada awal Rencana Strategis nilai indikator tujuan adalah 388 sedangkan target tujuan pada akhir rencana strategis adalah 390.
2. Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal rencana strategis nilai indikator tujuan adalah B sedangkan target tujuan pada akhir rencana strategis adalah A.

Sasaran strategis Kemantren Tegalrejo adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo. Sasaran strategis tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu :

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo. Pasa awal rencana strategis nilai indikator sasaran adalah 388 sedangkan target sasaran pada akhir rencana strategis adalah 390.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal rencana strategis nilai indikator sasaran adalah B sedangkan target akhir rencana strategis adalah A.

Tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh program kegiatan yang diampu oleh Kemantren Tegalrejo yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sasaran program sebagaimana juga

tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra lima tahun terkahir (2020 – 2024) sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2. 6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN TEGALREJO KOTA Yogyakarta
TAHUN 2020 - 2024

Tahun 2020 – 2022 :

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keisitimewaan

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

Tahun 2023 – 2024 :

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), *Clean Government* (Pemerintahan yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo		Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Poin	362	362	398	398	398	388	388	388	389	389
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Poin	80,8	80,4	81	83,25	81,5	83,25	83,25	83,51	83,5	85,3
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Rupiah	127.478.325	800.280.000	1.702.478.583	1.875.921.000	1.918.155.806	1.774.711.000	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Rupiah	-	-	-	-	-	-	2.148.334.503	3.305.672.310	2.406.134.643	2.591.762.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	-	-	155	54	165	124	100	98	90	87
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	-	B	A	B	A
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Nilai	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A

Dari table 2.6 diatas diketahui Kemantren Tegalrejo pada awal Tahun 2020 dalam renstra tahun 2017 – 2022 memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai Survei Kepuasanan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat, kemudian pada Tahun 2020 tersebut ada review indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada Tahun 2021 dilakukan review renstra yaitu review indikator program berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo menjadi 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan indikator program bertambah 1 (satu) yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga ada 3 (tiga) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Tegalrejo meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Tegalrejo menurun dengan indikator jumlah pelanggaran perda menurun dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Tegalrejo meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Berdasarakan tabel penyandingan di atas capaian periode Renstra 2017- 2022 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program sampai dengan Tahun 2022 selalu sama ataupun meningkat dari yang sudah ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Tegalrejo dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener.

Sementara untuk capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada tabel 2.6. yang berbeda karena periode Renstranya berbeda yaitu Periode Renstra 2023-2026. Dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Tegalrejo ada perubahan, di periode Renstra Tahun 2017-2022 hanya

ada satu IKU yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dari sasaran Strategis Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat dengan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat, sementara di periode Renstra Tahun 2023-2026 terdapat dua IKU dari dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, dan Misi 6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum. Sehingga dalam penyandingan target Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena berbeda periode Renstra tersebut mengalami sedikit kesulitan, sehingga untuk secara sederhananya tersaji seperti tabel 2.6. di atas.

Dari capaian lima tahun terakhir (2020 – 2024) dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran dan indikator program di setiap tahunnya sudah mencapai target ataupun melebihi target yang sudah disusun sebelumnya, keberhasilan tersebut terdapat berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung :

- Perencanaan program dan kegiatan selaras dengan Renstra Kemantren Tegalrejo
- Partisipasi atau dukungan warga masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahan
- Terjalinnya kolaborasi antara stakeholder, forkompimtren, juga OPD lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diwilayah
- Terselenggaranya dengan baik fungsi koordinasi, pengawasan dan kolaborasi antara MPP, Lurah, dan Perangkat Kelurahan/Kemantren dengan baik sehingga program dan kegiatan dapt dieksekusi sesuai dengan perencanaan.
- Pola komunikasi dan kepemimpinan MPP, lurah dalam menggerakkan

masyarakat untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat

- Adanya perbaikan mekanisme pelayanan, penambahan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan serta pengembangan pelayanan dengan berbasis JSS dan media sosial resmi Kemantren Tegalrejo (website, IG dan Nomor hotline pelayanan).

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kemantren Tegalrejo

Kelompok sasaran dari Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kemantren Tegalrejo tersebut, mencakup individu, keluarga, dan kelompok sosial lainnya. Kemantren sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan kota, memiliki tanggung jawab untuk melayani dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya, mulai dari pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, hingga kesejahteraan sosial.

Secara rinci kelompok sasaran ini meliputi :

1. Seluruh penduduk di Kemantren Tegalrejo

   Setiap individu yang tinggal di wilayah Kemantren Tegalrejo, baik warga asli maupun pendatang, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia.

2. Keluarga

   Kemantren juga berperan dalam menangani berbagai permasalahan keluarga, seperti kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

3. Kelompok Masyarakat

   Kemantren Tegalrejo berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti RT/RW, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok rentan.

4. Pihak – pihak yang Membutuhkan Pelayanan

   Ini termasuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, bantuan sosial, serta informasi dan edukasi terkait berbagai program pemerintah.

Dengan demikian, Kemantren hadir untuk melayani dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya serta memastikan terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban umum.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2025-2029 dan Kemantren Tegalrejo akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kemantren Tegalrejo ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan adaptif aparatur terhadap penguasaan teknologi informatika

dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas. Berbagai penyelesaian tugas / pekerjaan dan pelayanan bersinggungan langsung atau menggunakan berbagai aplikasi (system) yang berbasis teknologi informatika. Diperlukan aparatur / pegawai dengan penguasaan teknologi yang memadai guna mendukung penyelesaian tugas/ pekerjaan maupun pelayanan.

2. Tuntutan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dari masyarakat. Tuntutan ini mendorong perlunya penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai dan selaras dengan kemajuan system pelayanan maupun aplikasi pendukung pelayanan/ penyelesaian pekerjaan.
3. Koordinasi dengan stakeholder dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah . Koordinasi yang lebih intensif dan mendorong atau memberikan ruang kepada stakeholder berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi di wilayah. Dengan dukungan aktif dari stakeholder akan memberikan dampak pada pentyelesaian maslah yang lebih cepat, tepat dan akurat.

4. Kaderisasi pengurus pada kelembagaan sosial kemasyarakatan. Banyak pengurus kelembagaan yang sudah lansia yang merangkap pada kelembagaan lain (memegang kepengurusan lebih dari satu atau dua kelembagaan di wilayah). Perlu adanya dorongan kepada kaum muda untuk mengambil peran dalam kepengurusan lembaga sosial kemasyarakatan di wilayah, sehingga keeksisan kelembagaan dapat dipertahankan.

5. Peningkatan budaya literasi digital masyarakat sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses pelayanan dan mengurangi adanya korban kejahatan digital. Dengan kedasaran / budaya literasi digital yang tinggi dari masyarakat, pelayanan berbasis elektronik dapat semakin optimal dan meningkatkan efisiensi kerja pemerintah.

6. Penumbuhan spirit gotong royong dan handarbeni terhadap sarana prasarana di wilayah. Semangat ini akan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada atau sudah terbangun sehingga tidak harus menunggu penanganan dari pemerintah sepanjang dapat dijangkau oleh masyarakat sendiri.

7. Kurangnya kesadaran pengelolaan sampah di wilayah. Masyarakat belum

semuanya memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah berbasis keluarga. Kurangnya kesadaran dan kemauan untuk memilah sampah menjadikan permasalahan sampah di wilayah masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

8. Penumbuhan lembaga perekonomian berbasis kelompok masyarakat di wilayah. Dengan semakin banyak dan kuatnya lembaga perekonomian akan mendorong investasi serta meningkatkan kesejahteaan masyarakat. Namun penumbuhan lembaga perekonomian ini juga harus diimbangi dengan dukungan permodalan maupun marketing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

9. Penyusunan program kegiatan yang berpihak pada kelompok rentan/ afirmasi gender (perempuan, ibu hamil dan anak, lansia, disabilitas, masyarakat miskin) baik dimulai dari penyusunan perencanaan sampai pada produk perencanaan / kegiatan yang berpihak kepada kelompok rentan tersebut

2.2. Permasalaha dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut **:**

1. Penanganan Sampah belum Optimal

   Warga masyarakat belum optimal dalam memilah dan mengolah sampah berbasis rumah tangga sehingga potensi pembuangan sampah ke TPS masih tinggi dan terjadi pengolahan sampah yang tidak tepat
2. Tantangan Kaderasisasi Kelembagaan

   Lembaga mengalami kesulitan dalam regenerasi atau pengkaderan sehingga banyak warga masyarakat yang menjabat sebagai pengurus di beberapa kelembagaan.
3. Lembaga Perekonomian diwilayah belum Optimal

   Penumbuhan ekosistem lembaga perekonomian berbasis kearifan lokal seperti kelompok gandeng gendong , kube belum optimal.

2.2.2. Isu Strategis

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengolahan Sampah berbasis Rumah Tangga

   Masyarakat didorong untuk mau dan mampu mengolah dan memilah sampah baik sampah organik maupun an organik sehingga permasalahan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Sampah yang akan menjadi beban dari TPS hanyalah sampah residu. Pengolahan sampah secara mandiri berbasis rumah tangga akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan dan dapat bernilai ekonomis. Serta mengoptimalkan sarana prasaran pengolahan sampah seperti biopori, magot, dan ember tumpuk.

   Pengelolaan sampah di wilayah merupakan bagian dari kewenangan Mantri Pamong Praja sehingga memungkinkan desain kegiatan yang mendorong masyarakat berperan aktif dalam penanganan masalah sampah dengan memilah dan mengolah sampah dari rumah. Memperkuat kapasitas dan peran kelembagaan seperti bank sampah.

2. Pembangunan Sistem Kaderisasi Pengurus Kelembagaan

   Banyaknya lembaga sosial kemasyarakat maupun lembaga yang dibentuk oleh OPD teknis mengakibatkan lembaga sulit mencari kader pengurus. Sehingga banyak masyarakat yang duduk di beberapa kelembagaan , hal ini bisa berdampak kinerja kelembagaan tersebut tidak optimal. Perlu disusun skema pengkaderan yang tepat dan menarik khususnya bagi generasi muda. Kaderisasi pengurus kelembagaan diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan untuk menjadi pengurus kelembagaan.

3. Penumbuhan Semangat Ekosistem dalam Lembaga Perkonomian Wilayah

   Banyaknya lembaga perekonomian yang ada diwilayah yang masih mengedepankan rasa memiliki yang berlebih pada setiap individu ataupun kelompok, hal ini sangat berdampak kepada kinerja serta kepercayaan terhadap lembaga perekonomian tersebut. Perlu adanya pelatihan ataupun sosialisasi serta fasilitasi dalam membangun atau membentuk sebuah lebaga perekonomian di wilayah.

TABEL 2.7.

TEKNIS MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemilahan sampah baik organik maupun an organik di tingkat rumah tangga sudah dilakukan dan di masing – masing sudah terbentuk bank sampah untuk pengelolaan sampah. Dalam pembuangan sampah an organik sudah melalui transporter atau penggerobak	Penanganan Sampah belum Optimal	Pengelolaan persampahan belum optimal	- Perubahan iklim dan ketahana kota - Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA)	- Tantangan transisi ke kota rendah emisi dan berketahanan lingkungan - Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengolahan Sampah berbasis Rumah Tangga
- Pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan,	Tantangan Kaderasisasi Kelembagaan	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Disrupsi informasi, polarisasi sosial	Kerentanan ketahanan sosial ekonomi	- Dinamika perkembangan wilayah	Pembangunan sistem kaderisasi pengurus

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
kaderisasi, dan fasilitasi koordinasi untuk kelembagaan masyarakat - Sosial melibatkan seluruh kelembagaan serta seluruh kalangan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			dan ketimpangan yang meningkat	terhadap krisis pangan dan risiko bencana	perkotaan Regional DIY - Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	kelembagaan
- Pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan – pelatihan, kaderisasi, fasilitasi untuk peningkatan lembaga perekonomian dan masyarakat	Lembaga Perekonomian diwilayah belum Optimal	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	- Ketidakpastian kondisi ekonomi global - Disrupsi informasi, polarisasi sosial dan ketimpangan	Kerentanan ketahanan sosial ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana	- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan - Peningkatan	Penumbuhan Semangat Ekosistem dalam Lembaga Perkonomian Wilayah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			yang meningkat		kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyakarat berbasis sumber daya lokal	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta maka disusunlah Rencana trategis Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo yang merupakan dokumen perencanaan OPD Kemantren Tegalrejo 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi OPD sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Tegalrejo memiliki satu tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Tegalrejo** tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan **Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo** dengan formula perhitungan: 80 % nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren + 20 % nilai Evaluasi Kinerja Kemantren.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.

Tujuannya :

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu

Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut :

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) adalah proses sistematis untuk menilai kinerja seorang Mantri Pamong Praja dan seluruh perangkat Kemantren dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren di Pemerintah Kota Yogyakarta. EKK bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

EKK dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren, serta untuk meningkatkan kinerja Mantri Pamong Praja dan perangkatnya. EKK melibatkan tim evaluasi yang melakukan penilaian secara sistematis terhadap kinerja Kemantren berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.

EKK EKK mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Kemantren. Hasil EKK dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, memberikan penghargaan kepada Kemantren yang berprestasi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Tujuan Kemantren Tegalrejo Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo, pada awal Renstra target indikator tujuan adalah 494,2 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 498,2.

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2025 – 2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran,

bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Tegalrejo menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

   Sasaran ini akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra (tahun 2025) nilai indikator tujuan adalah 390, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra (tahun 2029) adalah 399.

2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif.

   Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo oleh Inspektorat. Pada awal Renstra (tahun 2025) target nilai PMPRB adalah A (87,976 - 90,000), sedangkan target nilai PMPRB pada akhir Renstra (tahun 2029) adalah A (87,980- 90,000).

Teknik dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
KEMANTREN TEGALREJO
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Tegalrejo		Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo (Poin)	494,2	494,2	495,2	496,2	497,2	498,2	498,2	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	390	390	391	392	393	394	394	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	A	A	A	A	A	A	A	

3.3. Strategi Dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025 - 2029, yaitu Membangunan “Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kemantren Tegalrejo menunjukkan bagaimana cara PD Kemantren Tegalrejo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Tegalrejo.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi PD Kemantren Tegalrejo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak- pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingup PD. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang

dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

3.3.1. Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. RPJMD 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat

pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	**Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik**	**Akselerasi Pembangunan Prioritas**	**Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan**	**Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan**

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informas dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi

lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

   Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”.

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

   Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk

menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

   Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

3.3.2 Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada periode 2025-2029, Kemantren Tegalrejo difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Tegalrejo pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis 2025 - 2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam rencana strategi Kemantren Tegalrejo 2025 – 2029 selaras dengan RPJMD 2025 – 2029 dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025- 2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari misi dan aspek strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategi Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan Peran serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan Sinergitas *stakeholder* penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan

Program Perangkat Daerah mencakup seluruh upaya pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat Perangkat Daerah. Penyusunan program ini mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dalam Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, program dan kegiatan yang direncanakan meliputi :

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan:**
   1) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Dengan Sub Kegiatan
      1. Gelar Budaya Jogja

2. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**
   1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Kricak
      Dengan Sub Kegiatan
      1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Kricak
   2) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Karangwaru
      Dengan Sub Kegiatan
      1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Karangwaru
   3) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Tegalrejo
      Dengan Sub Kegiatan

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Tegalrejo

4) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Bener

Dengan Sub Kegiatan

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Bener

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Dengan Sub Kegiatan

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dengan Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Evaluasi Kelurahan

3) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak

4) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru

5) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo

6) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener

7) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

8) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dengan Sub kegiatan :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dengan Sub kegiatan :

2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menggambarkan/merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo				Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo (Poin)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo (poin)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kricak)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Karangwaru)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Tegalrejo)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Bener)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kricak	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Karangwaru	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Bener)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Bener	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Bener	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kricak	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Karangwaru	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Bener)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Bener	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Tegalrejo)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Tegalrejo)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yangMengikuti Pelatihan KeluargaTanggap Bencana Alam(Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Tegalrejo		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Tegalrejo		Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo (Predikat)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo (Predikat)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai IKM Kemantren Tegalrejo (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025 – 2029 Kemantren Tegalrejo sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	Persentase	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	Laporan	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja					30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	Laporan	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang	Persentase	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kricak)	Berkualitas (Persentase)																
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kricak	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Karangwaru)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	Persentase	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Karangwaru	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Tegalrejo)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	Persentase	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Bener)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	Persentase	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Bener	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Tegalrejo)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	Persentase	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN					12.560.598.616		12.560.598.616		12.816.077.823,8		13.141.359.482,71		13.498.649.981,38		13.963.518.459,3		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.361.841.205		7.783.574.788		7.941.887.541		8.143.467.422		8.364.852.836		8.652.899.887		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Tegalrejo	Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo (Predikat)	Predikat	A	A	8.361.841.205	A	7.783.574.788	A	7.941.887.541	A	8.143.467.422	A	8.364.852.836	A	8.652.899.887	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	
	Nilai IKM Kemantren Tegalrejo (Nilai)	Nilai	85,3	85,4		85,4		85,5		85,6		85,7		85,8			
	Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo (Predikat)	Predikat	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.702.500		12.822.500		13.083.306		13.415.360		13.780.122		14.254.712		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	1	21.702.500	1	12.822.500	1	13.083.306	1	13.415.360	1	13.780.122	1	14.254.712		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.250.000		1.990.000		2.030.476		2.082.010		2.138.619		2.212.274		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	3.250.000	4	1.990.000	4	2.030.476	4	2.082.010	4	2.138.619	4	2.212.274		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.805.000		1.205.000		1.229.509		1.260.714		1.294.993		1.339.593		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	1	1.805.000	1	1.205.000	1	1.229.509	1	1.260.714	1	1.294.993	1	1.339.593		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					875.000		575.000		586.695		601.585		617.942		639.224		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	875.000	1	575.000	1	586.695	1	601.585	1	617.942	1	639.224		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.350.000		1.750.000		1.785.595		1.830.913		1.880.695		1.945.467		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	2.350.000	1	1.750.000	1	1.785.595	1	1.830.913	1	1.880.695	1	1.945.467		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					1.175.000		875.000		892.797		915.456		940.347		972.733		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	1.175.000	1	875.000	1	892.797	1	915.456	1	940.347	1	972.733		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.522.500		5.602.500		5.716.454		5.861.538		6.020.913		6.228.273		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	7	7	10.522.500	7	5.602.500	7	5.716.454	7	5.861.538	7	6.020.913	7	6.228.273		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.725.000		825.000		841.780		863.144		886.613		917.148		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	1	1.725.000	1	825.000	1	841.780	1	863.144	1	886.613	1	917.148		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.433.112.500		5.564.927.071		5.678.117.684,8		5.822.228.311,71		5.980.534.699,38		6.186.504.313,3		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	40	37		37		37		37		37		37			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.428.250.000		5.559.794.571		5.672.880.792		5.816.858.507		5.975.018.889		6.180.798.540		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	40	37	6.428.250.000	37	5.559.794.571	37	5.672.880.792	37	5.816.858.507	37	5.975.018.889	37	6.180.798.540		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300.000		300.000		306.102		313.870		322.405		333.508		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	300.000	12	300.000	12	306.102	12	313.870	12	322.405	12	333.508		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					450.000		2.100.000		2.142.714		2.197.096		2.256.835		2.334.560		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	450.000	12	2.100.000	12	2.142.714	12	2.197.096	12	2.256.835	12	2.334.560		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					450.000		450.000		459.153		470.806		483.607		500.262		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	450.000	12	450.000	12	459.153	12	470.806	12	483.607	12	500.262		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					585.000		405.000		413.237		423.725		435.246		450.236		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	585.000	1	405.000	1	413.237	1	423.725	1	435.246	1	450.236		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.417.500		817.500		834.127		855.298		878.553		908.811		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	2	1	1.417.500	2	817.500	2	834.127	2	855.298	2	878.553	2	908.811		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.420.000		820.000		836.678,8		857.913,71		881.240,38		911.590,3		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	1.420.000	12	820.000	12	836.678,8	12	857.913,71	12	881.240,38	12	911.590,3		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					240.000		240.000		244.881		251.096		257.924		266.806		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1	1	240.000	1	240.000	1	244.881	1	251.096	1	257.924	1	266.806		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.220.000		1.320.000		1.346.848		1.381.029		1.418.581		1.467.437		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	3.220.000	1	1.320.000	1	1.346.848	1	1.381.029	1	1.418.581	1	1.467.437		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					460.000		330.000		336.712		345.257		354.645		366.859		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	460.000	1	330.000	1	336.712	1	345.257	1	354.645	1	366.859		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					920.000		660.000		673.424		690.515		709.291		733.719		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	920.000	12	660.000	12	673.424	12	690.515	12	709.291	12	733.719		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					460.000		330.000		336.712		345.257		354.645		366.859		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	460.000	12	330.000	12	336.712	12	345.257	12	354.645	12	366.859		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.840.000		1.840.000		1.877.425		1.925.074		1.977.417		2.045.519		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen	2	2	1.840.000	2	1.840.000	2	1.877.425	2	1.925.074	2	1.977.417	2	2.045.519		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.840.000		1.840.000		1.877.425		1.925.074		1.977.417		2.045.519		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen	2	2	1.840.000	2	1.840.000	2	1.877.425	2	1.925.074	2	1.977.417	2	2.045.519		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.579.580		210.547.950		214.830.493		220.282.890		226.272.383		234.065.203		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	229.579.580	5	210.547.950	5	214.830.493	5	220.282.890	5	226.272.383	5	234.065.203		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	25	19		19		19		19		19		19			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	8	5		5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.645.000		20.770.000		21.192.461		21.730.326		22.321.174		23.089.915		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	5	15.645.000	5	20.770.000	5	21.192.461	5	21.730.326	5	22.321.174	5	23.089.915		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					96.220.380		102.218.850		104.297.981		106.945.064		109.852.900		113.636.234		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7	5	96.220.380	5	102.218.850	5	104.297.981	5	106.945.064	5	109.852.900	5	113.636.234		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					24.689.200		30.034.100		30.644.993		31.422.763		32.277.148		33.388.773		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	8	5	24.689.200	5	30.034.100	5	30.644.993	5	31.422.763	5	32.277.148	5	33.388.773		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					31.155.000		32.695.000		33.360.016		34.206.693		35.136.773		36.346.883		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	31.155.000	3	32.695.000	3	33.360.016	3	34.206.693	3	35.136.773	3	36.346.883		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					61.180.000		23.950.000		24.437.143		25.057.357		25.738.667		26.625.106		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	25	19	61.180.000	19	23.950.000	19	24.437.143	19	25.057.357	19	25.738.667	19	26.625.106		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					690.000		880.000		897.899		920.687		945.721		978.292		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	4	690.000	4	880.000	4	897.899	4	920.687	4	945.721	4	978.292		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					308.099.700		176.136.150		179.718.759		184.280.020		189.290.594		195.809.763		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	126	14	308.099.700	14	176.136.150	14	179.718.759	14	184.280.020	14	189.290.594	14	195.809.763		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	48	87		87		87		87		87		87			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					120.048.500		108.136.150		110.335.639		113.135.957		116.212.124		120.214.470		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	48	87	120.048.500	87	108.136.150	87	110.335.639	87	113.135.957	87	116.212.124	87	120.214.470		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					188.051.200		68.000.000		69.383.120		71.144.063		73.078.470		75.595.293		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	126	14	188.051.200	14	68.000.000	14	69.383.120	14	71.144.063	14	73.078.470	14	75.595.293		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					972.965.260		977.271.988		997.149.700		1.022.457.358		1.050.257.973		1.086.428.858		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	6	12	972.965.260	6	977.271.988	6	997.149.700	6	1.022.457.358	6	1.050.257.973	6	1.086.428.858		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	3	12		3		3				3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	4	1		1				1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.550.000		4.000.000		4.081.360		4.184.944		4.298.733		4.446.781		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	4	1	3.550.000	1	4.000.000		4.081.360	1	4.184.944	1	4.298.733	1	4.446.781		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					122.291.260		123.515.988		126.028.303		129.226.901		132.740.580		137.312.166		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	3	12	122.291.260	3	123.515.988	3	126.028.303		129.226.901	3	132.740.580	3	137.312.166		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					847.124.000		849.756.000		867.040.037		889.045.513		913.218.660		944.669.911		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	6	12	847.124.000	6	849.756.000	6	867.040.037	6	889.045.513	6	913.218.660	6	944.669.911		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					606.969.665		552.936.700		564.183.431		578.502.405		594.231.886		614.697.232		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	7	18		18		18		18		18		18			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5	5		5		5		5		5		5			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23.332.000		20.632.000		21.051.654		21.585.945		22.172.867		22.936.501		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	7	18	23.332.000	18	20.632.000	18	21.051.654	18	21.585.945	18	22.172.867	18	22.936.501		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					64.454.700		81.994.700		83.662.472		85.785.825		88.118.342		91.153.138		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	1	1	64.454.700	1	81.994.700	1	83.662.472	1	85.785.825	1	88.118.342	1	91.153.138		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					53.045.000		62.310.000		63.577.385		65.190.979		66.963.522		69.269.745		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	7	7	53.045.000	7	62.310.000	7	63.577.385	7	65.190.979	7	66.963.522	7	69.269.745		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					431.102.965		198.000.000		202.027.320		207.154.773		212.787.311		220.115.706		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5	5	431.102.965	5	198.000.000	5	202.027.320	5	207.154.773	5	212.787.311	5	220.115.706		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.035.000		190.000.000		193.864.600		198.784.883		204.189.844		211.222.142		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5	5	35.035.000	5	190.000.000	5	193.864.600	5	198.784.883	5	204.189.844	5	211.222.142		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					95.251.000		220.571.000		225.057.268		230.769.640		237.043.262		245.205.941		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	Poin	114,5	114,5	95.251.000	114,5	220.571.000	114,5	225.057.268	114,5	230.769.640	114,5	237.043.262	114,5	245.205.941	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					56.458.000		142.428.000		145.324.900		149.013.400		153.064.262		158.336.041		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Dokumen	1	1	56.458.000	1	142.428.000	1	145.324.900	1	149.013.400	1	153.064.262	1	158.336.041		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					56.458.000		142.428.000		145.324.900		149.013.400		153.064.262		158.336.041		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Dokumen	1	1	56.458.000	1	142.428.000	1	145.324.900	1	149.013.400	1	153.064.262	1	158.336.041		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					38.793.000		78.143.000		79.732.368		81.756.240		83.979.000		86.869.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Laporan	4	4	38.793.000	4	78.143.000	4	79.732.368	4	81.756.240	4	83.979.000	4	86.869.900		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen	2	4		4		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					7.567.000		20.553.000		20.971.000		21.503.400		22.088.000		22.848.100		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen	2	4	7.567.000	4	20.553.000	4	20.971.000	4	21.503.400	4	22.088.000	4	22.848.100		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					31.226.000		57.590.000		58.761.368		60.252.840		61.891.000		64.021.800		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Laporan	4	4	31.226.000	4	57.590.000	4	58.761.368	4	60.252.840	4	61.891.000	4	64.021.800		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.732.468.975		4.728.584.957		4.824.761.241		4.947.222.658		5.081.716.097		5.256.707.022		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	Poin	187,25	188,25	379.291.180	188,25	379.291.180	189,25	387.002.842	190,25	396.833.500	191,25	407.603.097	192,25	421.622.022	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					97.865.000		119.659.000		122.092.000		125.192.000		128.590.097		133.023.022		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	7	10	97.865.000	10	119.659.000	10	122.092.000	10	125.192.000	10	128.590.097	10	133.023.022		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					97.865.000		119.659.000		122.092.000		125.192.000		128.590.097		133.023.022		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	7	10	97.865.000	10	119.659.000	10	122.092.000	10	125.192.000	10	128.590.097	10	133.023.022		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					85.138.550		4.410.155.857		4.499.857.399		4.614.067.158		4.739.513.000		4.902.735.000		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	85.138.550	4	60.862.080	4	62.099.000	4	63.678.000	4	65.400.000	4	67.650.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Laporan	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					81.858.380		51.732.460		52.784.000		54.125.000		55.590.000		57.510.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakat	4	4	81.858.380	4	51.732.460	4	52.784.000	4	54.125.000	4	55.590.000	4	57.510.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan					3.280.170		9.129.620		9.315.000		9.553.000		9.810.000		10.140.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Laporan	1	1	3.280.170	1	9.129.620	1	9.315.000	1	9.553.000	1	9.810.000	1	10.140.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga					98.410.900		131.188.800		133.857.000		137.256.000		140.983.000		145.830.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Laporan	4	4	90.450.500	4	87.662.000	4	89.445.000	4	91.716.000	4	94.206.000	4	97.450.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					90.450.500		87.662.000		89.445.000		91.716.000		94.206.000		97.450.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Laporan	4	4	90.450.500	4	87.662.000	4	89.445.000	4	91.716.000	4	94.206.000	4	97.450.000		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	7.960.400	4	43.526.800	4	44.412.000	4	45.540.000	4	46.777.000	4	48.380.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					7.960.400		43.526.800		44.412.000		45.540.000		46.777.000		48.380.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	7.960.400	4	43.526.800	4	44.412.000	4	45.540.000	4	46.777.000	4	48.380.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					55.950.800		67.581.300		68.954.842		70.707.500		72.630.000		75.119.000		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Keluarga	1	160	27.200.000	160	18.355.000	160	18.728.000	160	19.204.000	160	19.726.000	160	20.400.000		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					27.200.000		18.355.000		18.728.000		19.204.000		19.726.000		20.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Keluarga	1	160	27.200.000	160	18.355.000	160	18.728.000	160	19.204.000	160	19.726.000	160	20.400.000		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	Keluarga	50	50	8.606.000	50	17.451.300	50	17.806.259	50	18.258.500	50	18.755.000	50	19.400.000		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					8.606.000		17.451.300		17.806.259		18.258.500		18.755.000		19.400.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	Keluarga	50	50	8.606.000	50	17.451.300	50	17.806.259	50	18.258.500	50	18.755.000	50	19.400.000		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	Keluarga	650	80	11.044.800	80	31.775.000	80	32.420.583	80	33.245.000	80	34.149.000	80	35.319.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	Keluarga	200	330		330		330		330		330		330			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					11.044.800		25.060.000		25.569.000		26.219.000		26.932.000		27.859.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	Keluarga	650	80	11.044.800	80	25.060.000	80	25.569.000	80	26.219.000	80	26.932.000	80	27.859.000		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					9.100.000		6.715.000		6.851.583		7.026.000		7.217.000		7.460.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	Keluarga	200	330	9.100.000	330	6.715.000	330	6.851.583	330	7.026.000	330	7.217.000	330	7.460.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Bener)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	Poin	187,25	187,25	798.366.200	188,25	674.709.475	189,25	688.433.065	190,25	705.905.600	191,25	725.099.000	192,25	750.071.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.583.366.000		4.410.155.857		4.499.857.399		4.614.067.158		4.739.513.000		4.902.735.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	25	96	367.706.800	138	323.418.000	138	329.996.322	138	338.371.600	138	347.572.000	138	359.542.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					367.706.800		323.418.000		329.996.322		338.371.600		347.572.000		359.542.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	25	96	367.706.800	138	323.418.000	138	329.996.322	138	338.371.600	138	347.572.000	138	359.542.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	10	83	430.659.400	26	351.291.475	26	358.436.743	26	367.534.000	26	377.527.000	26	390.529.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					430.659.400		351.291.475		358.436.743		367.534.000		377.527.000		390.529.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	10	83	430.659.400	26	351.291.475	26	358.436.743	26	367.534.000	26	377.527.000	26	390.529.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	Poin	187,25	187,25	1.094.114.100	188,25	1.097.293.000	189,25	1.119.611.928	190,25	1.148.027.800	191,25	1.179.243.000	192,25	1.219.854.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.563.366.000		4.410.155.857		4.499.857.399		4.614.067.158		4.739.513.000		4.902.735.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	21	185	544.642.500	138	691.253.000	138	705.313.086	138	723.214.000	138	742.878.000	138	768.462.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					544.642.500		691.253.000		705.313.086		723.214.000		742.878.000		768.462.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	21	185	544.642.500	138	691.253.000	138	705.313.086	138	723.214.000	138	742.878.000	138	768.462.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	16	21	549.471.600	26	406.040.000	26	414.298.842	26	424.813.800	26	436.365.000	26	451.392.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					549.471.600		406.040.000		414.298.842		424.813.800		436.365.000		451.392.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	16	21	549.471.600	26	406.040.000	26	414.298.842	26	424.813.800	26	436.365.000	26	451.392.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)		187,25	187,25	1.236.649.700	188,25	1.423.756.600	189,25	1.452.715.809	190,25	1.489.585.758	191,25	1.530.086.000	192,25	1.582.782.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.563.366.000		4.410.155.857		4.499.857.399		4.614.067.158		4.739.513.000		4.902.735.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	21	185	470.317.500	138	458.991.600	138	468.327.489	138	480.213.700	138	493.270.000	138	510.258.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					470.317.500		458.991.600		468.327.489		480.213.700		493.270.000		510.258.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	21	185	470.317.500	138	458.991.600	138	468.327.489	138	480.213.700	138	493.270.000	138	510.258.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	8	32	766.332.200	26	964.765.000	26	984.388.320	26	1.009.372.058	26	1.036.816.000	26	1.072.524.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					766.332.200		964.765.000		984.388.320		1.009.372.058		1.036.816.000		1.072.524.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	8	32	766.332.200	26	964.765.000	26	984.388.320	26	1.009.372.058	26	1.036.816.000	26	1.072.524.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	Poin	187,25	187,25	1.257.138.725	188,25	1.153.534.702	189,25	1.176.997.597	190,25	1.206.870.000	191,25	1.239.685.000	192,25	1.282.378.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
(Kelurahan Tegalrejo)																	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.563.366.000		4.410.155.857		4.499.857.399		4.614.067.158		4.739.513.000		4.902.735.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	152	148	709.181.800	138	630.251.700	138	643.071.019	138	659.392.000	138	677.321.000	138	700.647.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					709.181.800		630.251.700		643.071.019		659.392.000		677.321.000		700.647.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	152	148	709.181.800	138	630.251.700	138	643.071.019	138	659.392.000	138	677.321.000	138	700.647.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	18	148	547.956.925	26	523.283.002	26	533.926.578	26	547.478.000	26	562.364.000	26	581.731.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					547.956.925		523.283.002		533.926.578		547.478.000		562.364.000		581.731.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Unit	18	148	547.956.925	26	523.283.002	26	533.926.578	26	547.478.000	26	562.364.000	26	581.731.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					67.552.250		24.144.500		24.635.583		25.260.880		25.947.613		26.841.130		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Tegalrejo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	Persentase	100	100	58.142.250	100	24.144.500	100	24.635.583	100	25.260.880	100	25.947.613	100	26.841.130	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah					58.142.250		24.144.500		24.635.583		25.260.880		25.947.613		26.841.130		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
dan Peraturan Kepala Daerah																	
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	3	3	58.142.250	3	24.144.500	3	24.635.583	3	25.260.880	3	25.947.613	3	26.841.130		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					58.142.250		24.144.500		24.635.583		25.260.880		25.947.613		26.841.130		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	3	3	58.142.250	3	24.144.500	3	24.635.583	3	25.260.880	3	25.947.613	3	26.841.130		
Meningkatnya operasi ketertiban					0		0		0		0		0		0		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					85.972.625		89.495.800		91.316.085		93.633.857		96.179.354		99.491.329		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	Persentase	100	100	85.972.625	100	89.495.800	100	91.316.085	100	93.633.857	100	96.179.354	100	99.491.329	7.01.4.01.2.22.01.0000 - Kemantren Tegalrejo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					85.972.625		89.495.800		91.316.085		93.633.857		96.179.354		99.491.329		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Orang	40	30	11.600.625	30	14.179.000	30	14.467.400	30	14.834.700	30	15.237.800	30	15.762.329		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					11.600.625		14.179.000		14.467.400		14.834.700		15.237.800		15.762.329		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Orang	40	30	11.600.625	30	14.179.000	30	14.467.400	30	14.834.700	30	15.237.800	30	15.762.329		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	12	12	74.372.000	12	75.316.800	12	76.848.685	12	78.799.157	12	80.941.554	12	83.729.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					74.372.000		75.316.800		76.848.685		78.799.157		80.941.554		83.729.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	12	12	74.372.000	12	75.316.800	12	76.848.685	12	78.799.157	12	80.941.554	12	83.729.000		

4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni
   c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
   c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
   d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
   e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Kemantren Tegalrejo bukan merupakan OPD penanggung jawab langsung atas Program Prioritas Wali Kota Yogyakarta, namun berperan sebagai salah satu OPD pendukung yang turut mendukung dan memperkuat pelaksanaan program prioritas tersebut. Berikut Program Prioritas yang menjadi dukungan Kemantren Tegalrejo yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 dan dalam RPJMD 2025-2029:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kemudian dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan juga dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang adaptif.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, kemudian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener. Kemudian dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, selanjutnya dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Sub Kegiatan

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat dan Program Pemajuan Ekonomi Kreatif.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Jogja Tangguh Bencana.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang Adaptif. Program Prioritas tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Tegalrejo					
1	Penataan kelembagaan yang Adaptif	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				7.01.02.2.04 -Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	
				7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2	Posyandu Paripurna : Gerakan Warga Sehat	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kricak	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Karangwaru	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Bener	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kricak	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Karangwaru	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Bener	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Tegalrejo	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				7.01.03.2.06.0006 – Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
				7.01.03.2.06.0007 – Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				7.01.03.2.06.0010 – Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
3	Jogja Tangguh Bencana	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kemantren	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4	Penataan kelembagaan yang Adaptif	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	

4.3. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKU berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 tetap berlaku, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMANTREN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo	poin	494,2	494,2	495,2	496,2	497,2	498,2	
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	poin	390	390	391	392	393	394	394
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Nilai	A (87,976)	A (87,976 - 90,000)	A (87,977 - 90,000)	A (87,978 - 90,000)	A (87,979 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)

4.3.1 Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo

Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo menjadi indikator kinerja dalam mencapai tujuan OPD, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan di wilayah Kemantren Tegalrejo. Target capaian ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang terdiri dari 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren dan 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.

Evaluasi kinerja kemantren dilaksanakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penyelenggaraan evaluasi ini berasaskan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sinergisitas, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kreativitas serta inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sasaran evaluasi mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren satu kali dalam setahun sebagai upaya menjaga konsistensi kinerja dan kualitas pembangunan di setiap kemantren

4.3.2 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD, yaitu meningkatnya perkembangan pembangunan di wilayah Kemantren Tegalrejo. Target capaian ditentukan melalui perhitungan jumlah nilai perkembangan pembangunan seluruh kelurahan yang ada, dibagi dengan jumlah kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, nilai evaluasi perkembangan pembangunan digunakan untuk menentukan status capaian hasil pembangunan desa dan kelurahan, sekaligus untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tahapan kemajuan desa maupun kelurahan berdasarkan instrumen evaluasi perkembangan yang telah ditetapkan

Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan Kelurahan;

b. Kinerja;

c. Inisiatif dan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat;

b. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government; dan

c. Pelestarian adat dan budaya.

2) Bidang Kewilayahan

a. Identitas desa dan kelurahan;

b. Batas;

c. Inovasi;

d. Tanggap dan siaga bencana; dan

e. Pengaturan investasi.

3) Bidang Kemasyarakatan

a. Partisipasi masyarakat;

b. Lembaga Kemasyarakatan;

c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);

d. Keamanan dan ketertiban;

e. Pendidikan;

f. Kesehatan;

g. Ekonomi;

h. Penanggulangan kemiskinan; dan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

4.3.3 Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo

Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD, yaitu meningkatnya tata kelola kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif. Target capaian diperoleh dari hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas, dengan aparatur yang produktif serta melayani secara prima. Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemantren Tegalrejo berkewajiban melaksanakan reformasi birokrasi sesuai pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah

Birokrasi Level Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) parameter penilaian yaitu :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
4) Indeks Kepuasan Masyarakat
5) Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP
6) Indeks Profesionalitas (IP) ASN

7) Penilaian Pengawasan Arsip Internal
8) Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

TABEL 4.5

KATEGORI DAN PREDIKAT NILAI REFORMASI BIROKRASI

No.	Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 – 100	AA	Istimewa
2.	>80 – 90	A	Sangat Baik
3.	>70 – 80	BB	Baik
4.	>60 – 70	B	Cukup Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup
6.	>30 – 50	C	Buruk
7.	>0 – 30	D	Sangat Buruk

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kota Yogyakarta. Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

LAMPIRAN

1. Penyeragaman Pohon Kinerja Internal
2. Penyeragaman *Cascading* Kinerja Internal
3. Penyeragaman *Cross Cutting* Internal
4. Pohon Kinerja Kemantren Tegalrejo 2025-2029
5. *Cascading* Kinerja Kemantren Tegalrejo 2025-2029
6. Data Kinerja (Metadata Renstra) Kemantren Tegalrejo 2025-2029

PENYERAGAMAN POHON KINERJA INTERNAL

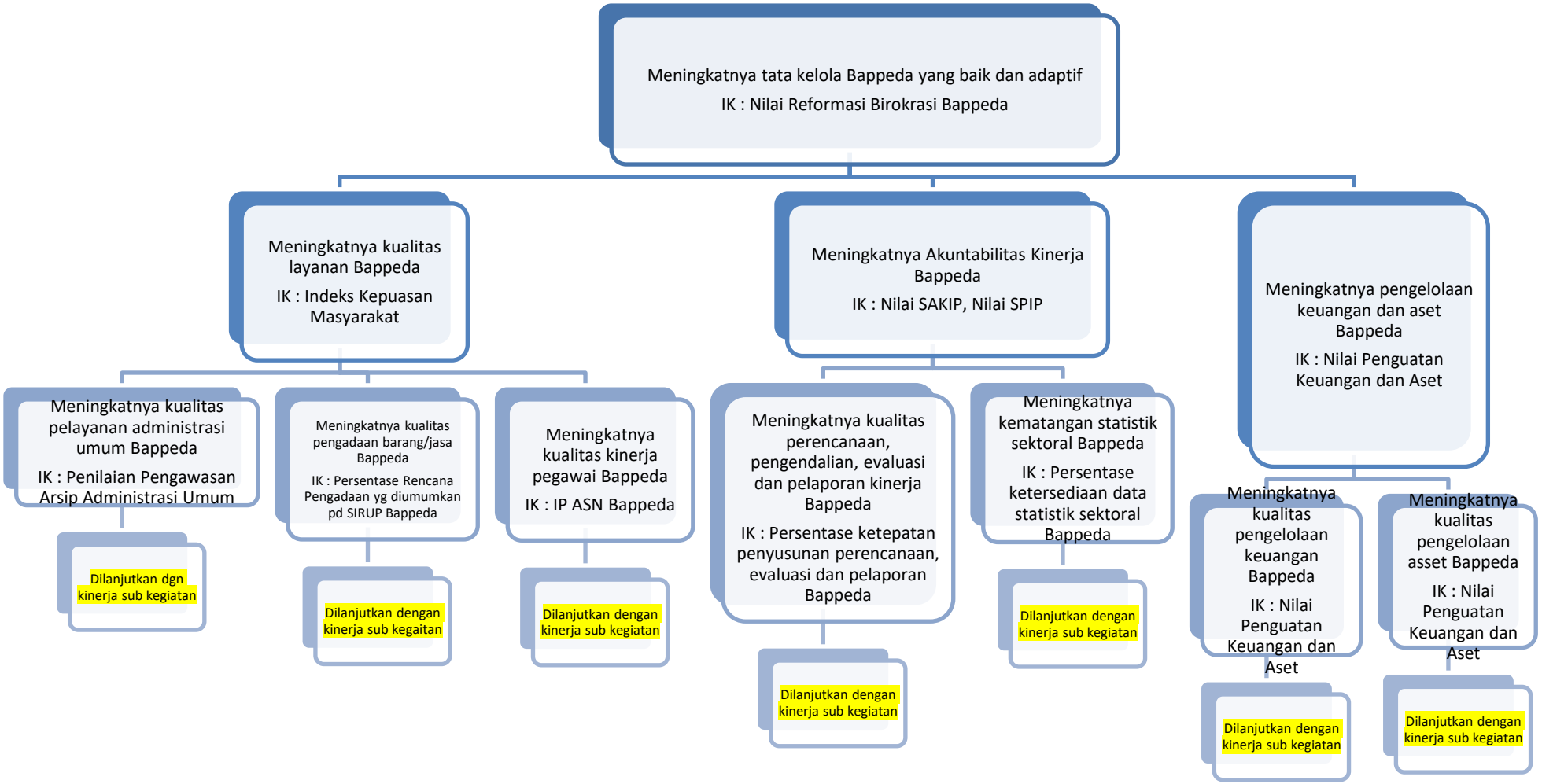

PENYERAGAMAN *CASCADING* KINERJA INTERNAL

No	Tujuan/Sasaran Stratgis/Sasaran Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pengampu
Sasaran : Meningkatnya tata kelola Bappeda yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda	Kepala Bappeda
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Bappeda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Bappeda Nilai SPIP Bappeda IKM Bappeda	Sekretaris Bappeda
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda Persentase ketersediaan data statistik sectoral Bappeda	Ketua Tim Kerja PEP
1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Kasubbag Keu
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	Kasubbag Umpeg
1.4	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Bappeda	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Bappeda	Kasubbag Umpeg
1.5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Bappeda	Kasubbag Umpeg
1.6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda	Kasubbag Umpeg

PENYERAGAMAN *CROSS CUTTING* INTERNAL

Nama OPD	Dukungan Kegiatan
BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

POHON KINERJA
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

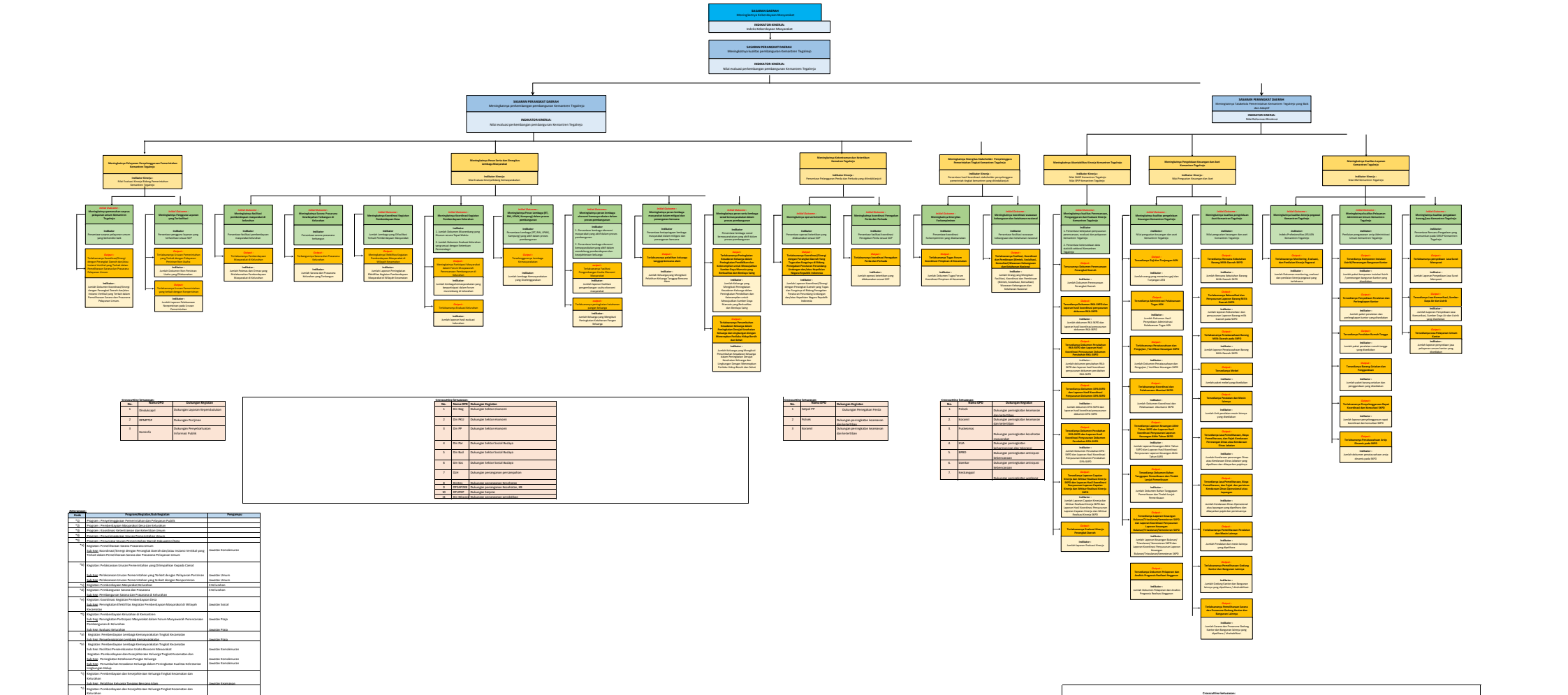

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dinsosyapm	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perizinan
3	Kemenkfa	Dukungan Pengelolaluasan Informasi Publik

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Dag	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Bud	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sos	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	Dish	Dukungan penanganan permasalahan
8	Disnkis	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DPUPKPP	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
10	DPUPKP	Dukungan Sosial
11	Din Kesos	Dukungan penanganan sosial

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4	Kua	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi
5	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi bencanaan
6	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi bencanaan
7	Kecamatan	Dukungan penyelatan wabah

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Renstra Kemantrejaan RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Pengelolaan, Perabadatakan, Keuangan dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPPDM	Pengelolaan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4	Kesbangpol Daerah	Penyiapan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penelaan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Pelaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerjasama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengelolaan Barang dan Jasa, Kearsipandaerahan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Statistik
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan

Keterangan:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengampu
*01	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
*02	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
*03	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
*04	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
*05	Program : Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
*01	Kegiatan: Penyelenggaraan Sarana Prasarana Umum Sub Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan Kemakmuran
*01	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Sub Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kompensasi	Jawatan Umum Jawatan Umum
*01	Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3 Kelurahan
*02	Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana	3 Kelurahan
*03	Sub Keg: Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	
*01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa Sub Keg: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kemantren	Jawatan Sosial
*01	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Sub Keg: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Keg: Evaluasi Kelurahan	Jawatan Pora Jawatan Pora
*01	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren Sub Keg: Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jawatan Pora
*01	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren Sub Keg: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Sub Keg: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sub Keg: Pemunahkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran
*01	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan Sub Keg: Pelatihan Kelurahan Tanggap Bencana Alam	Jawatan Kemakmuran
*01	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan Sub Keg: Pemunahkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sub Keg: Pemunahkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jawatan Sosial Jawatan Sosial
*01	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jawatan Keamanan
*01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penugasan Kepala Daerah Sub Keg: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Pora
*02	Sub Keg: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Rembuk, Sarasehan, Konsultasi	Jawatan Kemakmuran
*01	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Consultitive Setiadaan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Renstra Kemantrejaan RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Pengelolaan, Perabadatakan, Keuangan dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPPDM	Pengelolaan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4	Kesbangpol Daerah	Penyiapan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penelaan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, P

CASCADING KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2021-2026

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya kualitas pelayanan Kemantren Tegalrejo	Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo	(40% rata-rata hasil pembangunan fisik kemantren) + (60% rata-rata hasil evaluasi kinerja kemantren)	496,2	495,2	496,2	497,2	498,2	499	**Meningkatnya Tatakelola pemerintahan di Kemantren Tegalrejo yang baik dan akuntabel**	**Nilai Kinerja Kemantren Tegalrejo**	**Hasil pendekatan manfaat terhadap biaya dan hasil akhir kegiatan**	A (87,976 - 90,000)	A (87,977 - 90,000)	A (87,978 - 90,000)	A (87,979 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)	A (87,981 - 90,000)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Kinerja Perangkat Daerah pelayanan Kemantren Tegalrejo	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo	Nilai SAKIP Kemantren Tegalrejo Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo Nilai IKM Kemantren Tegalrejo	Mantri Anom

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Penganggu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggu	Target						Sub Kegiatan	Kasatran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penganggu	Target						Usulan Perubahan Nomenklatur penganggu
				2025	2026	2027	2028	2029	2030							2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kemantren Tegalrejo yang baik dan akuntabel	Nilai Kinerja Kemantren Tegalrejo	Hasil pendekatan manfaat terhadap biaya dan hasil akhir kegiatan	A (87,976 - 90,000)	A (87,977 - 90,000)	A (87,978 - 90,000)	A (87,979 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)	A (87,981 - 90,000)	Mantri Anom	Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Evaluasi Kinerja Kemantren Tegalrejo	Persentase kompetensi pemerintahan kemantren dan pelayanan Kemantren Tegalrejo	Jumlah dokumen pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Tegalrejo yang disusun sesuai tahun dilaksanakan dan Evaluasi Kinerja Kemantren Tegalrejo yang wajib dievaluasi x 100%	Sub. Bag Kesi PHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Bag Kesi PHP	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
													Persentase ketersediaan data statistik yang dievaluasi sesuai kemtentuan dilingi jumlah data statistik sektoral x 100%	Jumlah data statistik yang dievaluasi sesuai kemtentuan dilingi jumlah data statistik sektoral x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
																						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub.Bag Kesi PHP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
											Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Tegalrejo	Min pengawasan kewenagan dan aset Kemantren Tegalrejo	Hasil pemikiran pengelolaan kewenagan Kemantren Tegalrejo oleh SPKAD	Sub.Bag Kesi PHP	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Pemeliharaan Gajiskan Tunjangan	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Bag Kesi PHP	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	
																						Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub.Bag Kesi PHP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
																						Pelaksanaan Pemrosesan dan Penggajian Sertifikasi Kewenagan SKPD	Terlaksanannya Pelaksanaan Pemrosesan dan Penggajian Sertifikasi Kewenagan SKPD	Jumlah Dokumen Pemrosesan dan Penggajian Sertifikasi Kewenagan SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
																						Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
																						Pengelolaan dan Penyajian Data e-Tunjangan Pemerintah	Terwujudnya Dokumen Rekap Data e-Tunjangan Pemerintah	Jumlah Dokumen Rekap Data e-Tunjangan Pemerintah	Sub.Bag Kesi PHP	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub.Bag Kesi PHP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Terlaksanannya Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Sub.Bag Kesi PHP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
											Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Tegalrejo	Min pengawasan kewenagan dan aset Kemantren Tegalrejo	Hasil pemikiran pengelolaan kewenagan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Sub.Bag Umum dan Keprograman	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Keprograman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
																						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya Perkoordinasian dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Perkoordinasian dan penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Keprograman	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
																						Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Keprograman	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tertib pegawai Kemantren Tegalrejo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	Hasil pemikiran IP ASN Kemantren Tegalrejo oleh BKPSDM	Sub. Bag Umum dan Keprograman	83,49 nilai	84,0 nilai	84,04 nilai	84,56 nilai	84,925 nilai	85,58 nilai	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Aparatur Pegawai	Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Aparatur Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan pembinaan aparatur	Sub. Bag. Umum dan Keprograman	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Tegalrejo	Persentase pengawasan aset di Kemantren/Kemantren Tegalrejo	Hasil pemikiran pengawasan aset di kemantren	Sub. Bag Umum dan Keprograman	85,0 nilai	86,0 nilai	86,02 nilai	86,03 nilai	86,04 nilai	86,05 nilai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Keprograman	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket																		

| | | |

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	114,5	114,75	115	115,25	115,5	115,75	115,75	116	TRUE	seharusnya data kinerja di sesuaikan dengan cascading buksn dengan pohon kinerja
									Sumber data:										FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kricak	Poin	117	117	117	117	117	117	117	118	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Karangwaru	Poin	113	114	114	115	115	115	115	115	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalrejo	Poin	115	115	115	115	115	116	116	116	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bener	Poin	113	113	114	114	115	115	115	115	TRUE	
									Jumlah kelurahan		4	4	4	4	4	4	4	4	TRUE	
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Tegalrejo	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik		Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	Sarpras pelayanan umum yang menjadi kewenangan kemantren yang masuk dalam Perwal Pelimpahan Kewenangan, misalnya ialah : Jalan yang tidak bernomer ruas, SPAH, MCK, SAH, Titik PJU, Cermin Cembung, pos ronda
									Sumber Data:										FALSE	
									- Sarpras pelayanan umum berkondisi baik	unit	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	FALSE	
									- Total Sarpras	unit	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	FALSE	
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber Data:										FALSE	
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	layanan	733	733	733	733	733	733	733	733	FALSE	
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi	layanan	733	733	733	733	733	733	733	733	FALSE	
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	187,25	187,25	188,25	189,25	190,25	191,25	191,25	192,25	FALSE	
									Sumber Data:										FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kricak	Poin	188	188	189	189	189	190	190	191	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Karangwaru	Poin	181	181	182	185	187	189	189	190	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalrejo	Poin	191	191	192	192	193	193	193	194	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bener	Poin	189	189	190	191	192	193	193	194	FALSE	
									Jumlah kelurahan	kelurahan	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan		Jumlah Lembaga	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18	FALSE	
									Sumber Data:										FALSE	
									Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18	FALSE	
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan		Jumlah Dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									Sumber Data:										FALSE	
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
							- Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen Musrenbang	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber Data:										FALSE	
									Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	berasal dari DPA
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	32	32	32	32	32	32	32	32	FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	32	32	32	32	32	32	32	32	FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	185	185	185	185	185	185	185	185	FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	185	185	185	185	185	185	185	185	FALSE	
					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	21	21	21	21	21	21	21	21	FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	21	21	21	21	21	21	21	21	FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	185	185	185	185	185	185	185	100	FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	185	185	185	185	185	185	185	100	FALSE	
					1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	148	148	148	148	148	148	148	148	FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	148	148	148	148	148	148	148	148	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	146	146	146	146	146	146	146	146	FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	146	146	146	146	146	146	146	146	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	83	83	83	83	83	83	83	83	FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	83	83	83	83	83	83	83	83	FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	96	96	96	96	96	96	96	96	FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	96	96	96	96	96	96	96	96	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.7 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	256	256	256	256	256	256	256	256	FALSE	
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	256	256	256	256	256	256	256	256	FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.8 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan	lembaga	18	18	21	21	21	21	21	21	FALSE	
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	18	18	21	21	21	21	21	21	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan	angka	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan	angka	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
																			FALSE	
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada										FALSE	
									jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti										FALSE	
					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren dibagi hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti) x 100	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		dihitung dari Jumlah koordinasi dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah yang direncanakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Tegalrejo	1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Tegalrejo	Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70)					- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (83,2)	A (83,2-86,2)	A (83,3-86,3)	A (83,4-86,4)	A (83,5-86,5)	A (83,6-86,6)	A (83,6-86,6)	A (83,7-86,7)	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	A (83,2)	FALSE	
																			FALSE	
			Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo	menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor					- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	4,303-4,500	4,303-4,500	4,304-4,500	4,305-4,500	4,306-4,500	4,307-4,500	4,307-4,500	4,308-4,500	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	4,303-4,500	Terkelola dan Terukur (4,303-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,304-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,305-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,306-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,307-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,307-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,308-4,500)	FALSE	
																			FALSE	
			Nilai IKM Kemantren Tegalrejo						- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,3	85,3	85,4	85,5	85,6	85,7	85,7	85,8	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,3								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Tegalrejo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang wajib disusun.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang disusun tepat waktu	dokumen	15	15	15	15	15	15	15	15	FALSE	
									jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang wajib disusun	dokumen	15	15	15	15	15	15	15	15	FALSE	
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									Jumlah data statistik sektoral	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
																			FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Tegalrejo	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Tegalrejo	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Tegalrejo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Tegalrejo		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Tegalrejo oleh BKPSDM	Nilai	83,49	83,49	83,5	83,51	83,52	83,53	83,53	83,54	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Tegalrejo oleh BKPSDM	Nilai	83,49								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	83,2	83,2	83,21	83,22	83,23	83,24	83,24	83,25	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	83,2								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Tegalrejo	Persentase ~~Prosentase~~ Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Tegalrejo		Jumlah belanja Kemantren Tegalrejo yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Tegalrejo dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah belanja Kemantren Tegalrejo yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	13.206								FALSE	
									Jumlah belanja pada DPA Kemantren Tegalrejo	Rupiah	13.206								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Tegalrejo oleh BPKAD	Nilai	5									

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEMANTREN JETIS

TAHUN 2025 - 2029

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingannya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen Renstra Kemantren Jetis ini merupakan bagian dari upaya Kemantren Jetis dalam mendukung visi misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi pelaksana program kegiatan Kemantren Jetis dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang mengatur pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD Kota Yogyakarta. Dalam penyusunannya, Renstra ini dirancang secara sistematis, partisipatif dan terintegrasi dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, isu strategis wilayah dan tantangan pembangunan yang semakin komplek.

Kami berharap dokumen ini tidak sekedar pemenuhan kewajiban administratif namun juga dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kinerja kelembagaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Responsif dan berorientasi pada hasil serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta yang semakin maju, melesat cepat, inklusif dan berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini mulai dari tahap persiapan hingga finalisasi dokumen.

Yogyakarta, 15 September 2025
Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS

Drs. Ekwanto
NIP. 196905261997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1. Gambaran pelayanan perangkat daerah 6
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi 6
2.1.2 Sumber daya perangkat daerah 8
2.1.3 Keadaan pegawai 9
2.1.4 Keadaan sarana dan prasarana 11
2.1.5 Kinerja pelayanan perangkat daerah 14
2.1.6 Kelompok sasaran layanan 19
2.2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 20
2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah 20
2.2.2 Isu strategis perangkat daerah 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 25
3.1. Tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah 25
3.2. Sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 - 2029 26
3.3. Strategi Kemantren Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Jetis tahun 2025 - 2029 29
3.4. Arah kebijakan Kemantren Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 35
4.1 Program,kegiatan,sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan 35
4.2 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif 55
4.3 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah 70
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah 75
BAB V PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat pendidikan 9
Tabel 2.2 Jumlah ASN berdasarkan golongan 10
Tabel 2.3 Jumlah ASN berdasarkan jabatan 10
Tabel 2.4 Jumlah JLOP berdasarkan Pendidikan 11
Tabel 2.5 Data sarana dan prasarana Kemantren Jetis 11
Tabel 2.6 Evaluasi renstra periode tahun 2019 – 2022 15
Tabel 2.7 Evaluasi renstra periode tahun 2023 – 2026 17
Tabel 2.8 Teknis menyimpulkam isu strategis PD 24
Tabel 3.1 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 28
Tabel 3.2 Penahapan renstra Kemantren Jetis 30
Tabel 3.3 Teknik merumuskan arah kebijakan renstra PD 33
Tabel 4.1 Teknis merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Kemantren Jetis 42
Tabel 4.2 Rencana program perangkat daerah 56
Tabel 4.3 Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan 72
Tabel 4.4 Indikator kinerja utama perangkat daerah 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan penyusunan renstra PD 2
Gambar 2.1 Bagan susunan organisasi Kemantren..... 7
Gambar 2.2 Bagan susunan organisasi Kelurahan 8
Gambar 3.1 Konsep renstra Kemantren Jetis..... 26
Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra Kemantren Jetis 27
Gambar 4.1 Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan renstra Kemantren Jetis 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) : Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, hal ini disebabkan dalam penyusunan RPJMD harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya RPJMD dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan. Ketentuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang pada tahun 2025 turut mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pun mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD ini, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan daerah kota tentang RPJMD Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota dilantik. Dan pada pasal 71 diatur bahwa apabila penyelenggara

pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah RPJMD dalam waktu dimaksud dalam pasal 70 maka Bupati/Wali Kota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan berupa tidak dibayarkan hak - hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta pun telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman penyusunan renstra perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi beberapa tahapan antara lain : persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kemantren Jetis menjadi salah satu bagian dari Renstra Perangkat Daerah yang tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Tahapan penyusunan Renstra PD

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih lebih detil pada tingkat perangkat daerah. Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing perangkat daerah, Renstra perangkat daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan nantinya RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun oleh perangkat

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan pembangunan prioritas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
d. Undang – Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4)
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);

i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2);
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 65);
k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 38).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kemantren Jetis tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dari aspek urusan Pemerintahan Daerah dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Jetis.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;
2) Menetapkan program beserta indikator kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;
3) Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 (lima) tahun;
5) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
6) Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEMANTREN JETIS
2.1 Gambaran Pelayanan Kemantren Jetis
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.2 Sumber Daya Kemantren Jetis
2.1.3 Keadaan Pegawai
2.1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
2.1.5 Keadaan Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis
2.1.6 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kemantren Jetis
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kemantren Jetis
2.2.2 Isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029
3.2 Strategi Kemantren Jetis Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029
3.3 Arah Kebijakan Kemantren Jetis Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program,Kegiatan, Sub Kegiatan
4.2 Program Prioritas
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Jetis
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEMANTREN JETIS

2.1. Gambaran Pelayanan Kemantren Jetis

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kedudukan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta dan dipimpin oleh Mantri Pamong Praja sedang Kelurahan merupakan bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren serta dipimpin oleh Lurah.

Ketugasan kemantren meliputi mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut kemantren mempunyai fungsi yaitu :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tersaji lengkap dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kemantren Jetis

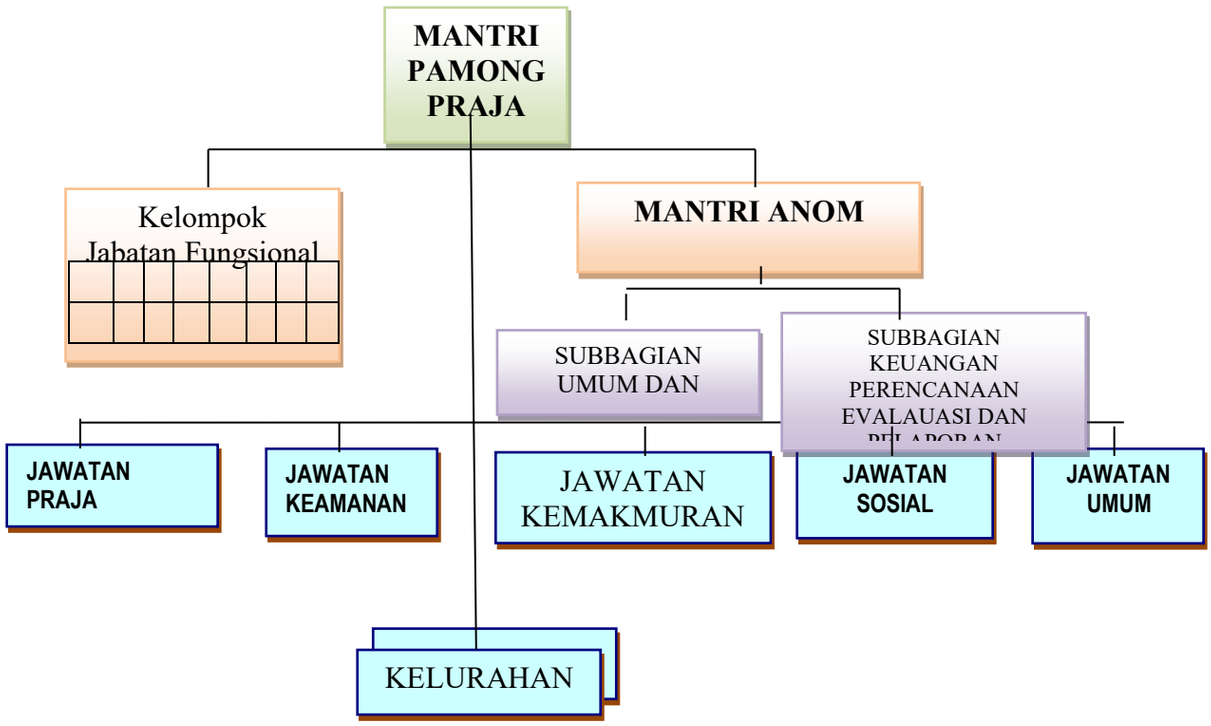

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023.

Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;
2. Mantri Anom, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan Umum; dan
8. Kelompok jabatan fungsional

Sedangkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kelurahan tersaji pada gambar sebagai berikut ini :

Gambar 2.2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

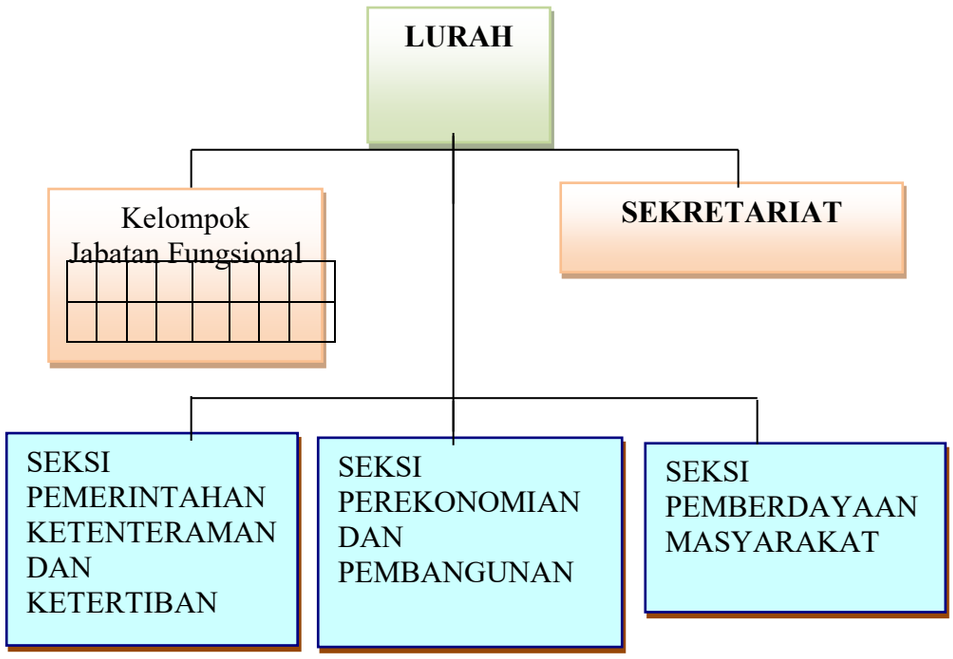

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Kemantren Jetis

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Kemantren Jetis Kota Yogyakarta didukung oleh sumber daya yang meliputi :

a. Sumber daya manusia

Kemantren Jetis Kota Yogyakarta memiliki pegawai ASN (PNS dan P3K) dan JLOP dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan urusan kewilayahan dan penunjang urusan pemerintahan, aspek SDM di Kemantren Jetis Kota Yogyakarta meliputi :

1. Jumlah pegawai per Kelurahan dan Kemantren
2. Kualifikasi Pendidikan (SMA, D3, S1, S2)
3. Kompetensi manajerial dan teknis
4. Ketersediaan pejabat fungsional (Pranata Komputer)

b. Sumber daya keuangan

Anggaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta berasal dari APBD (DAU murni dan Kelurahan) dan Dana Keistimewaan yang dialokasikan untuk :

1. Belanja langsung (barang jasa, modal dan hibah barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang – undangan)
2. Belanja tidak langsung (gaji dan tunjang ASN)

c. Sumber daya sarana dan prasarana

Kemantren Jetis Kota Yogyakarta didukung oleh fasilitasi kerja dan sarana penunjang yang meliputi :

1. Perangkat computer, printer, laptop dan jaringan internet
2. Ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip
3. Kendaraan operasional roda 2, roda 3 dan roda 4
4. Mushola
5. Tempat parkir

2.1.3 Keadaan pegawai

Jumlah pegawai Kemantren Jetis Kota Yogyakarta per 31 Juli 2025 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 29 orang PNS, 2 orang PPPK dan 12 orang Jasa Lainnya Orang Perorangan (JLOP) dengan rincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - laki	Perempuan	
1.	SMA/sederajat	2	0	2
2.	D3	3	7	10
3.	S1	5	11	16
4.	S2	1	2	3
	Jumlah	**11**	**20**	**31**

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Jumlah ASN Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sebanyak 31 orang yang terdiri dari perempuan dan laki – laki dengan latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendidikan SMA/sederajat diikuti oleh 2 orang (2 laki – laki)
2. Pendidikan D3 diikuti oleh 10 orang (3 laki – laki, 7 perempuan)
3. Pendidikan S1 diikuti oleh 16 orang (5 laki – laki, 11 perempuan)
4. Pendidikan S2 diikuti 3 orang (1 laki -laki, 2 perempuan)

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan, komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai Kemantren Jetis dengan jenjang pendidikan S1 perlu ditingkatkan karena saat ini terdapat pegawai yang sedang melaksanakan izin belajar guna peningkatan kompetensi dari pengolah data informasi ke penelaah teknis kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren Jetis sebagai perangkat daerah pendukung kewilayahan.

b) Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	2	0	2
2.	Golongan III	7	15	22
3.	Golongan II	1	4	5
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Golongan VII (PPPK)	1	1	2
	Jumlah	**11**	**20**	**31**

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Jumlah pegawai Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sebanyak 31 orang, terdiri dari :

1. Golongan IV sebanyak 2 orang (2 laki – laki)
2. Golongan III sebanyak 22 orang (7 laki – laki, 15 perempuan)
3. Golongan II sebanyak 5 orang (1 laki – laki, 4 perempuan)
4. Golongan I tidak ada
5. Golongan VII (PPPK) sebanyak 2 orang (1 laki – laki, 1 perempuan)

c) Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - laki	Perempuan	
1.	Mantri Pamong Praja	0	0	0
2.	Mantri Anom	1	0	1
3.	Kepala Jawatan	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	0	2	2
5.	Lurah	1	1	2
6.	Sekretaris Lurah	0	1	1
7.	Kepala Seksi	3	5	8
8.	JF Pelaksana	2	9	11
9.	JF Tertentu (PPPK)	1	1	2
	Jumlah	**11**	**20**	**31**

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ASN Kemantren Jetis Kota Yogyakarta per Juli 2025 berdasarkan jabatan sebanyak 31 orang yang terdiri :

1. Jabatan struktural berjumlah 18 orang (8 laki – laki, 10 perempuan)
2. Jabatan pelaksana berjumlah 11 orang (2 laki -laki, 9 perempuan)
3. Jabatan fungsional berjumlah 2 orang (1 laki -laki, 1 perempuan)
4. Tidak terdapat pegawai yang menjabat sebagai Mantri Pamong Praja definitif

Dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan, dari jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Jetis adalah 59 orang, dan saat ini baru terpenuhi 52,54 %. Jumlah ini masih kurang karena ada jabatan struktural yang belum terisi disebabkan oleh pensiun sebanyak 6 orang untuk jabatan Mantri

Pamong Praja 1 (satu) orang, Lurah 1 (satu) orang, Sekretaris Lurah 2 (dua) orang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1 (satu), Kepala Jawatan Sosial 1 (satu) serta belum memenuhi kebutuhan personil hasil analisis jabatan.

d) Berdasarkan Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Tabel 2.4 Jumlah Jasa Lainnya Orang Perseorangan berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - laki	Perempuan	
1.	SMA/sederajat	2	3	5
2.	D3	1	1	2
3.	S1	1	1	2
	Jumlah	**4**	**8**	**12**

Sumber data : SIM tenaga jasa lainnya orang perseorangan tahun 2025

Jumlah Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Kemantren Jetis Kota Yogyakarta yang terdiri dari 3 laki – laki dan 9 perempuan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan SMA/sederajat diikuti oleh 5 orang (2 laki – laki, 3 perempuan)
2. Pendidikan D3 diikuti oleh 2 orang (1 laki – laki, 1 perempuan)
3. Pendidikan S1 diikuti oleh 5 orang (1 laki – laki, 4 perempuan)

Penempatan jasa lainnya orang perseorangan ini yang tersebar di Kemantren dan Kelurahan direkruit guna pemenuhan jabatan administrasi umum.

2.1.4 Keadaan sarana dan prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Kemantren Jetis masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan penambahan barang baru. Data sarana dan prasarana Kemantren Jetis Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Jetis

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1.	Genset portable	4	4		
2.	Pompa air portabel	1	1		
3.	Pompa air	15	15		
4.	Pick Up	1	1		
5.	Sepeda Motor	15	15		
6.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3	3		
7.	Sepeda	4	3	1	
8.	Gergaji Chain Saw	1	1		
9.	Alat Ukur Universal	11	11		
10.	Station wagon	1	1		
11.	Micro indicator dengan perlengkapan suparto pointers dan revol	1			1
12.	Komposter	1	1		

13.	Mesin Ketik Manual standard (14 – 16 Inci)	2	1		1
14.	Mesin ketik manual Langewagen (18 – 27 inci)	1	1		
15.	Alat penyimpan perlengkapan kantor	2	1		1
16.	Lemari Besi/Metal	19	18	1	
17.	Lemari Kayu	28	23	5	
18.	Rak Besi	3	3		
19.	Rak Kayu	7	7		
20.	Filing Cabinet Besi	39	3		
21.	Brankas	2	2		
22.	Alat Kantor Lainnya	1	1		
23.	Lemari sorok	2	2		
24.	Papan Visual/Papan Nama	2	2		
25.	White Board	1	1		
26.	Alat Penghancur Kertas	1	1		
27.	LCD Projector/Infocus	7	7		
28.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2		
29.	Papan Nama Instansi	10	10		
30.	Meubelair	11	2	7	2
31.	Meja Kerja Kayu	28	28		
32.	Sice	7	7		
33.	Kursi kayu	6	2	4	
34.	Meja Rapat	37	23	14	
35.	Kasur/spring bed	2	2		
36.	Meja Resepsionis	1	1		
37.	Meja 1/2 Biro	9	9		
38.	Kursi Rapat	202	195	3	4
39.	Meja Tambahan	2	2		
40.	Meja Panjang	3	3		
41.	Kursi Putar	31	28	2	1
42.	Bangku Tunggu	6	6		
43.	Kursi Lipat	388	374	14	
44.	Meja Komputer	10	9	1	
45.	Sofa	2	2		
46.	Jam Listrik	5	5		
47.	Tempat sampah	1	1		
48.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		
49.	AC window	1	1		
50.	Alat pendingin	5	5		
51.	Lemari Es	2	2		
52.	A.C Split	31	30	1	
53.	Kipas Angin	10	8		2
54.	Alat dapur	3	3		
55.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1		
56.	Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	29	29		
57.	Microphone floor stand	1	1		
58.	Televisi	6	6		
59.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1		
60.	Lambang garuda Pancasila	3	3		
61.	Loudspeaker	7	7		
62.	Sound System	3	3		
63.	Wireless	3	3		
64.	Megaphone	2	2		
65.	Microphone	3	3		
66.	Camera video	2	2		
67.	Tangga Aluminium	5	5		

68.	Dispenser	11	11		
69.	Alat pemadam/portable	4	4		
70.	Pompa kebakaran/portable	1	1		
71.	Pesawat Telepon	1	1		
72.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	35		11
73.	Alat peraga edukatif (APE) arena permainan anak	2	2		
74.	Uninterupted Power Supply (UPS)	7	6	1	
75.	Rambu Cermin	5	5		
76.	Rambu Jalan	8	8		
77.	Handy Talky (HT)	11	11		
78.	Papan gambar	2	2		
79.	CCTV	5	5		
80.	Treng air/tandon air	7	7		
81.	Rak piring aluminium	1	1		
82.	Wastafel portabel	13		13	
83.	Handy cam	1	1		
84.	Karpet	1	1		
85.	Gordyin/kray	2	2		
86.	Meja kerja pejabat eselon III	3	3		
87.	Kursi kerja pejabat eselon IV	6	6		
88.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	1	1		
89.	Buffet kaca	1	1		
90.	Peralatan studio audio	7	7		
91.	Audio mixing console	1	1		
92.	Audio mixing portable	1	1		
93.	Audio amplifier	1	1		
94.	Microphone/wireless mic	4	3	1	
95.	Microphone/boom stand	4	4		
96.	Speaker (alat studio)	2	2		
97.	Camera electronic	2	2		
98.	Digital LED running text	1	1		
99.	Pulse generator (peralatan studio video dan film)	8	8		
100.	Pulse delay line	1	1		
101.	Video tape evaluator	1	1		
102.	Tripod camera	5	5		
103.	Camera digital	7	6	1	
104.	Telephone mobile	2	2		
105.	Facsimile	2	2		
106.	Wireless amplifier	2	2		
107.	Alat kedokteran umum	3	3		
108.	Glucometer complete with glucostic	4	4		
109.	Manual screen	1	1		
110.	Alat peraga praktek sekolah bidang studi olah raga	117	117		
111.	Infrared thermometer	13	13		
112.	PC unit	60	53	2	5
113.	Note book	7	7		
114.	CPU	1	1		
115.	Monitor	3	2	1	
116.	External/portable harddisk	2	2		
117.	Server	1	1		
118.	Router	2	2		
119.	Switch hub	1	1		
120.	Modem	1	1		
121.	Wireless access point	2	2		
122.	Peralatan computer lainnya	4	4		

123.	Rambu – rambu lalin darat lainnya	9	9		
124.	Bollard	5	5		
125.	Peralatan permainan	1	1		
126.	Alat tenis meja	18	18		
127.	Peralatan olahraga anak	1	1		
128.	Kursi lipat	7			7
129.	Radio	1			1
130.	Alat komunikasi radio VHF	1			1
131.	Mesin absen	1			1
	Jumlah	**1.521**	**1.411**	**72**	**38**

Sumber data : Data KIB, Juli 2025

2.1.5. **Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis**

Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang mendukung urusan kewilayahan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan Pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren dan Kelurahan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Jetis dengan indicator kinerja sasaran nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi Kemantren Jetis . agar sasaran tersebut dapat tercapai maka disusunlah program sebagai berikut :

A. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
B. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
C. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
D. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
E. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kinerja pelayanan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dan 2024 melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi berkat dukungan dari berbagai pihak dan sarana prasarana. Adapun realisasi kinerja pelayanan Kemantren Jetis pada tahun 2019 sampai tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6

Evaluasi Renstra Periode Tahun 2019 - 2022

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)								
					Target					Realisasi			
					2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantre Jetis	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	335 poin	338 poin mjd 370 poin	341 poin mjd 371 poin	344 poin mjd 373 poin	347 poin mjd 375 poin	370,66 poin	374,33 poin	398,66 poin	401,66 poin
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82,7 poin	82,9 poin mjd 86 poin	83,1 poin mjd 86,5 poin	83,3 poin mjd 87 poin	83,5 poin mjd 87,5 poin	86,25 poin	87,03 poin	87,14 poin	88 poin
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan	17%	19% mjd 25%	21% mjd 26%	23% mjd 27%	25% mjd 28%	30%	114.21 1.900	730.29 4.500	854.41 5.900

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)							
					Target				Realisasi			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	300 Pelanggaran	300 Pelanggaran	-	-	300 pelanggaran	290 pelanggaran
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai

Tabel 2.7

Evaluasi Renstra Periode Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)								Prosentase (%)	
					Target				Realisasi					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantre Jetis	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	401,67 poin	404 poin	404 poin	404 poin	402,33 poin	404 poin	-	-	100,16	100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	88,1 poin	88,2 poin	88,3 poin	88,4 poin	88,12 poin	88,23 poin	-	-	100,02	100,03
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan	854.415.900 Rupiah	935.773.000 rupiah	935.773.000 rupiah	935.773.000 rupiah	935.773.000 rupiah	1.277.190.556 rupiah	-	-	109,52	136,48

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)								Prosentase (%)	
					Target				Realisasi					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Jumlah Pelanggaran Perda	258 Pelanggaran	150 Pelanggaran	140 Pelanggaran	130 Pelanggaran	98 Pelanggaran	56 Pelanggaran	-	-	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai		-	100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	100	100

2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 38 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kemantren dan Kelurahan, sasaran pelayanan Kemantren Jetis adalah masyarakat di wilayah Kemantren Jetis. Dalam memberikan pelayanan Kemantren Jetis bermitra dengan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam dukungan perizinan
2. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kdalam dukungan pemberdayaan UMKM
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam dukungan administrasi kependudukan
4. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam dukungan pengembangan UMKM
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam dukungan penyebarluasan informasi publik
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam dukungan jaminan sosial
7. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta dalam dukungan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
8. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam dukungan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat
9. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dukungan pengembangan potensi pariwisata
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam dukungan penanganan sampah
11. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam dukungan pengembangan budaya dan kesenian
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dalam dukungan pemberdayaan keluarga berkualitas
13. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kota Yogyakarta dalam dukungan jaminan pendidikan
14. Satuan Kepolisian Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam dukungan penegakan perda
15. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam dukungan pembangunan sarana prasarana
16. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam dukungan mitigasi bencana
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan mitigasi bencana
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan perencanaan wilayah
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset

20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam dukungan wawasan kebangsaan dan berpolitik
21. Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dalam dukungan mitigasi bahaya narkoba
22. Polsek Jetis Kota Yogyakarta dalam dukungan keamanan dan ketertiban
23. Koramil Jetis Kota Yogyakarta dalam dukungan keamanan dan ketertiban
24. KUA Jetis Kota Yogyakarta dalam dukungan pembinaan rohani

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Jetis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota tentu tidak lepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang berasal baik dari internal maupun eksternal kemantren, kendala dan permasalahan yang terjadi di kemantren Jetis antara lain :

1. Tata kelola sampah
2. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kelurahan yang masih memerlukan pendampingan dari instansi teknis
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perda
4. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi atau kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau prioritas dalam penyelesaiannya karena mempunyai dampak yang besar terhadap masa depan. Isu strategis dapat berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, isu strategis yang terdapat di Kemantren Jetis antara lain :

1. **Peningkatan pelayanan kepada masyarakat**

   Pelayanan kepada masyarakat oleh Kemantren menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya Kemantren, Kemantren merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik, perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di Kemantren harus selalu dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

   Upaya untuk mewujudkan agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dengan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang kemudian Kota Yogyakarta mulai menerapkan di seluruh Kemantren sejak tanggal 12 Desember 2012, adanya PATEN ini merupakan perwujudan nyata dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan fasilitasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren Jetis telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan umum dan disahkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis Nomor 73/KPTS/JT/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta serta Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kemantren telah dilakukan reviu dan disusun dengan melibatkan unsur masyarakat dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Nomor 46/KPTS/JT/III/2025 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan layanan di masyarakat, Kemantren Jetis mempunyai layanan Pepak Jetis dan menyusun buku saku pelayanan agar memudahkan masyarakat dalam membantu dan menyelesaikan permasalahan pelayanan. Layanan Pepak Jetis merupakan layanan online Kemantren melalui Whatsapp dengan nomor 082223293279, layanan online tidak hanya dilakukan di Kemantren namun juga di Kelurahan.Untuk Kelurahan Bumijo pada nomor 089677778674, Kelurahan Cokrodiningratan pada nomor 0895406035075 dan di Kelurahan Gowongan menggunakan nomor HP petugas. Meskipun menggunakan HP petugas, layanan masyarakat dapat terselesaikan. Selain melalui layanan online, masyarakat dapat membuka website Kemantren dan Kelurahan untuk melihat dan memanfaatkan informasi layanan yang tersedia di Kemantren dan Kelurahan.

Dengan adanya penerapan mekanisme dan prosedur layanan diharapkan masyarakat tetap dapat terlayani secara optimal dan sesuai dengan prosedur. Untuk mendapatkan umpan balik, saran dan masukan dari pengguna layanan, Kemantren Jetis melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Agustus dengan metode pengumpulan secara manual dan elektronik, hasil survey diolah dan menjadi bahan perbaikan pelayanan di masa yang akan datang. Pada tahun 2024 hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis sebesar 88,1 atau kategori BAIK.

2. Pengurangan Resiko Stunting

Adanya permasalahan stunting yang masih tinggi membutuhkan upaya untuk pencegahan dan penanggulangannya, permasalahan stunting menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Senyampang dengan program prioritas Wali Kota terpilih, Kemantren Jetis melakukan berbagai upaya agar permasalahan stunting dapat terselesaikan, berikut upaya yang dilakukan :

a. Gerakan Jetis Peduli

   Merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan sembako bagi warga miskin dengan cara pengumpulan donasi dari karyawan Kemantren, Forkompintren dan perusahaan.

b. Kelon canting

   Adalah sekolah online pencegahan stunting yang diinisiasi oleh Kelurahan Cokrodiningratan dengan peserta ibu hamil dan calon pengantin, kegiatan ini bertujuan agar ibu hamil dan calon pengantin termotivasi dapat menjaga

kesehatan dengan memperhatikan gizi seimbang dan rajin memeriksakan kehamilannya secara rutin di faskes

c. Cething Ngebul

Merupakan kepanjangan dari Cegah Stunting Ngagem Dhahar Kembul, bentuk kegiatan pemberdayan masyarakat Kelurahan Gowongan dalam rangka pencegahan stunting, bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan lansia dengan memanfaatkan hasil pertanian kebun warga

3. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

- Kegiatan pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi warga untuk terus mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik.
- Selain itu untuk peningkatan derajat hidup warga masyarakat, Kemantren Jetis selalu menganggarkan pendanaan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, sarana prasarana umum serta akses jalan pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman dan layak huni bagi warga masyarakat.
- Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan angka kemiskinan melalui skema "Gandeng Gendong" memberikan multiplyer efect karena dapat menggerakkan roda perekonomian di level bawah dan memberikan kesempaan berusaha bagi warga kurang mampu. Selain itu program ini juga mampu merubah skema pasar karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan aplikasi 'Nglarisi" dalam pemesanan jamuan rapat-rapat OPD ke kelompok Gandeng Gendong.

4. Tatakelola sampah

Pengelolaan sampah di masyarakat yang belum optimal dan lahan yang sempit menjadi masalah yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan, guna mengatasi hal tersebut Kemantren Jetis memberikan dukungan bagi bank sampah sebagai pengelola dan menggerakkan peran masyarakat untuk mengelola sampah di wilayahnya. Salah satu kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah adanya program Papi dulang mami (Pusat Pengelolaan Daur Ulang Sampah Mandiri Kelurahan Bumijo), program ini bertujuan mengelola sampah limbah plastik untuk diolah menjadi produk siap jual. Diharapkan sampah limbah plastic dapat berkurang dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sehingga kesejahteraan dan kebersihan lingkungan dapat meningkat.

5. Pengembangan Kawasan Kali Code dan Kali Winongo

Letak Kemantren Jetis yang diapit sungai besar memberikan potensi yang cukup besar dalam pemanfaatan wilayah di sekitar Kali Code dan Kali Winongo untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata dan perekonomian, saat ini kedua sungai baru dimanfaatkan sebagai tempat upacara tadisional seperti Merti Code, Merti Mbelik Lanang Wadon yang hanya dinikmati oleh warga setempat. Sisi sungai yang sudah diperbaiki dan ditingkatkan sarananya belum dimanfaatkan

secara optimal, Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) belum dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk beraktifitas sehingga RTHP terbengkalai dan tidak terawat. Adanya permasalahan ini membutuhkan peran serta dan komitmen lintas sector, masyarakat dan pengampu wilayah sehingga Kawasan Kali Code dan Kali Winongo dapat berkembang.

Tabel 2.8

Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PerangD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan masyarakat	- Belum optimal dan belum merata program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Penanganan balita dengan gizi buruk dan stunting masih belum optimal - Masih adanya pelanggaran perda	- Pengelolaan persampahan yang belum optimal - Kerentanan dan kesenjangan sosial - Penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban	- Ketidakpastian kondisi ekonomi global - Disrupsi informasi, polarisasi sosial dan ketimpangan yang meningkat - Komitmen mewujudkan agenda Pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	- Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional - Kerentanan ketahanan sosial – ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	• Pengurangan Resiko Stunting • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis potensi lokal • tata kelola sampah • pengembangan Kawasan Kali Code dan Kali Winongo sektor perekonomian dan pariwisata
Lingkungan hidup	Belum optimalnya Pengelolaan sampah					
Kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kawasan Kali Code dam Kali Winongo yang belum optimal					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Jetis

Tujuan dan sasaran disusn sebagai hasil rumusan dari arah dan pedoman dalam mencapai visi dan misi organisasi yang hendak dicapai sesuai dengan target spesifik yang sistematis dan terukur pada periode tertentu. Rumusan ini menjadi dasar utama penyusunan kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro, lintas urusan dan mencerminkan akhir yang tidak lagi diturunkan menjadi indikator lanjutan.

Tujuan pembangunan daerah adalah suatu pernyataan yang menggambarkan langkah strategis yang harus diambil guna mewujudkan visi, misi dan menjawab isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah, tujuan ditetapkan berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta diarahkan untuk dicapai dalam periode waktu satu sampai lima tahun. Perumusan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program – program prioritas. Tujuan yang ditetapkan mencakup beragam focus pembangunan antara lain peningkatan kualitas pembangunan manusia, mewujudkan perekonomian yang inklusif an berkelanjutan, reformasi birokrasi yang berprinsip Good Governance, pengelolaan sumber daya daerah yang optimal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pelayanan public, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Dalam konteks perencanaan daerah, RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjabarkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan memuat serangkaian program dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada periode lima tahun. Implementasi visi dalam RPJMD dituangkan ke dalam misi, tujuan, sasaran dan indicator kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Kota Yogyakrta merumuskan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029 adalah “Membangun masyarakat adil, makmur, lestari dan berkeadaban” dan akan diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

1. mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses kesehatan
2. mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan social melalui pembangunan yang inklusif,kreatif dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya local
3. mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi dan berkeadaban dengan setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945
4. memperkokoh perjuangan mencapai tujuan keistimewaan DIY

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kota Yogyakarta, maka tujuan Kemantren Jetis untuk tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya kualitas pembangunan Kemnatren Jetis”. Tujuan ini akan diukur melalui idikator kinerja tujuan yaitu Indeks Pembangunan Kemantren Jetis. Pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra target yang ditetapkan adalah 520,20 poin dan pada akhir tahun Renstra sebesar 523,93 poin.

3.2 Sasaran Renstra Kemantren Jetis tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 yaitu "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis" maka Kemantren Jetis menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis

   Indicator kinerja yang digunakan untuk mengukur adalah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis. Pada awal tahun renstra (Tahun 2025) target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis sebesar 405 poin dan target di akhir tahun Renstra (Tahun 2029) sebesar 408,67
2. Meningkatnya tata kelola Kemantren Jetis yang baik dan adaptif

   Indicator kinerja yang digunakan untuk mengukur adalah Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis. Pada awal tahun Renstra (Tahun 2025) target nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis sebesar A (89,540 – 90,000) nilai dan target pada akhir tahun Renstra (Tahun 2029) sebesar AA (90,456 – 100,000) nilai

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a) Kalimat kondisi
b) Bersifat lebih khas sesuai engan tugas pokok fungsi perangkat daerah
c) Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
d) Disusun engan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berikut gambar konsep penyusunan Renstra Kemantren Jetis

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kemantren Jetis

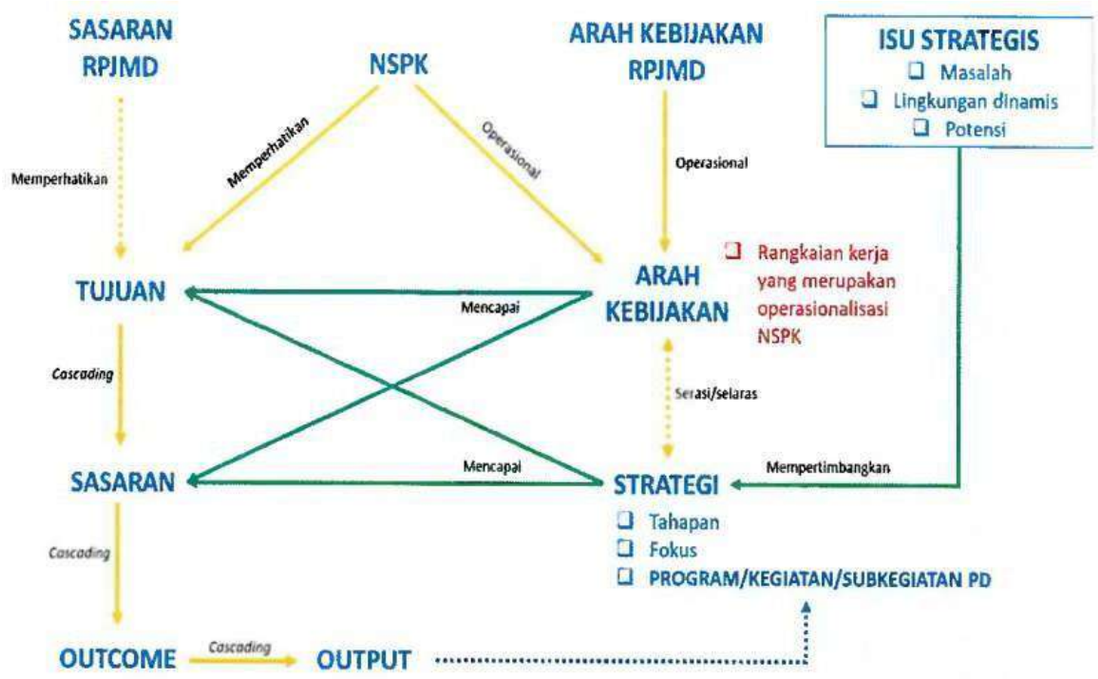

Berikut gambar kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Kemantren Jetis :

Gambar 3.2

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Kemantren Jetis

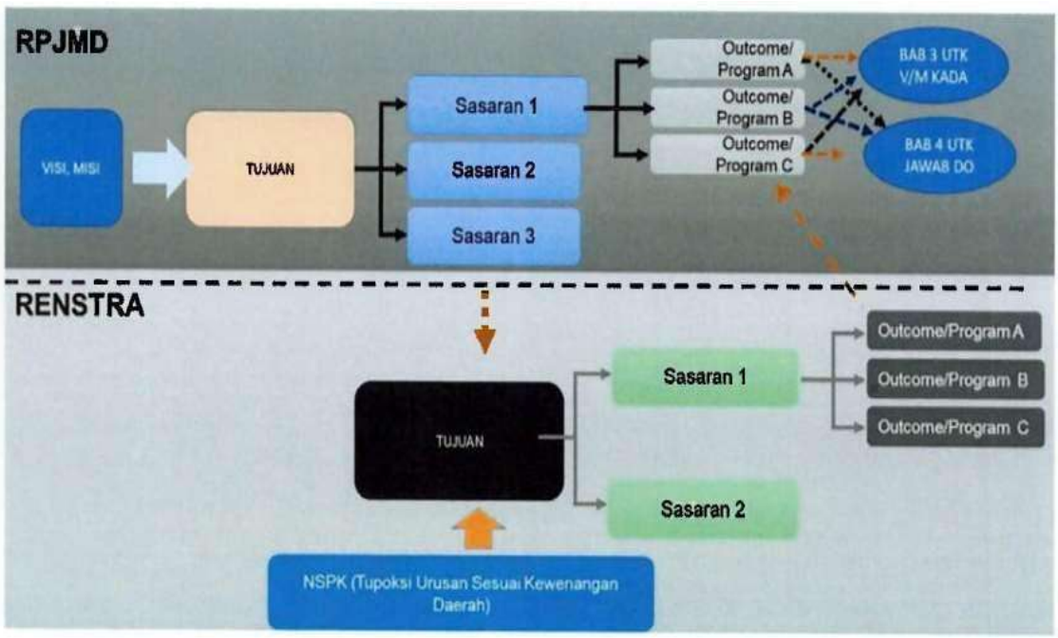

Adapun terkait dengan rumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 dalam penentuan targetnya dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai kondisi awal dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis		Indeks pembangunan Kemantren Jetis (Nilai)	519,4	520,2	520,93	521,93	522,93	523,93	524,93	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis (poin)	404	405	405,67	406,67	407,67	408,67	409,67	
		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Jetis yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Jetis (Nilai)	A	A	A	A	AA	AA	AA	

3.3. Strategi Kemantren Jetis Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kemantren Jetis. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai. Strategi Kemantren Jetis mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penahapan pembangunan merupakan strategi perencanaan tahapan kerja tahunan yang disusun secara sistematis dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalan Renstra, penahapan ini menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode lima tahun perencanaan.

Setiap tahapan pembangunan dirancang berdasarkan pendekatan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, urgensi penyelesaian isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Penahapan ini juga memperhatikan sinergi antar program dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan agar setiap sasaran strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penetapan prioritas tahunan dilakukan melalui proses evaluasi dan penyesuaian terhadap capaian program sebelumnya serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, dengan demikian pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana namun juga resposif terhadapa tantangan dan peluang yang mungkin terjadi saat pelaksanaan.

Melalui penahapan pembangunan ini, diharapkan perangkat daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal, mempercepat pencapaian target pembangunan dan mewujudkan visi dan misi daerah dengan hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penahapan Renstra Kemantren Jetis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kemantren Jetis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan : • Penguatan fondasi tata kelola pemerintahan • Identifikasi kebutuhan pembangunan wilayah • Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan • Konsolidasi data dan sinergi program lintas sektor	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik : • Optimalisasi pelayanan publik • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan • Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Awal pelaksanaan program prioritas infrastruktur wilayah	Akselerasi Pembangunan Prioritas • Akselerasi capaian sasaran strategis • Evaluasi tengah periode • Pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas Replikasi praktik baik pelayanan pemerintahan	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan : • Pemantapan hasil program dan kegiatan strategis • Penguatan ketertiban dan ketentraman wilayah • Peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi Penguatan sinergi lembaga masyarakat	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan : • Konsolidasi hasil pembangunan • Penguatan keberlanjutan program unggulan • Finalisasi capaian tujuan dan sasaran Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan periode berikutnya

1) Tahap penguatan dasar dan dan kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam Pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025 – 2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi Pembangunan termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, Pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

2) Tahap peningkatan akses dan kualitas layanan public

   Tahap kedua merupakan tahap lanjut dari tema pembangunan tahap pertama dengan dasar – dasar Pembangunan seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan. Focus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan public yang berorientasi pada menciptakan layanan public yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan public ini tidak dimaknai sempit terbatas pada akses jangkauan layanan secara geografis tetapi lebih pada upaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan public yang berkualitas. Dalam konteks tersebut maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan public akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, Masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan public yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan maupun layanan sosial lainnya sehingga system layanan public menjadi lebih cepat, efisien dan merata.

3) Tahap akselerasi Pembangunan prioritas

   Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya visi dan misi Pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini focus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan Pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian Pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan focus pada pencapaian yang lebih mendalam.

Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

4) Tahap pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan public yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program – program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai factor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapijuga bersifat inklusif, berkesinambungan dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar untuk menciptakan system yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata serta dapat diteruskan melalui system yang efisien dan berkelanjutan yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5) Tahap penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indicator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat adil Makmur, Lestari dan berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (periode 2030 – 2034), yang menekankan pada tema "Akselerasi pembangunan" guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi yang kuat, hasil – hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang menuju "Kota Yogyakarta Yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai – Nilai Keistimewaan".

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Jetis Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.

Seluruh arah kebijakan dirancang agar selaras dengan strategi pembangunan dan mendukung secara langsung pencapaian target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan kata lain arah kebijakan ini menjadi landasan dalam melaksanakan program kegiatan yang efektif, efisien serta terukur guna memperkuat kinerja perangkat daerah sesuai mandate yang diberikan.

Berikut Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra kemantren Jetis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	1. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Jetis	a) Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis b) Meningkatnya pengguna layanan yang terfasilitasi	
		2. Meningkatnya peran serta dan sinergitas Lembaga masyarakat	a) Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa b) Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan c) Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan terbangun d) Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan e) Meningkatkan peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan f) Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan g) Meningkatnya peran serta Lembaga social dalam proses pembangunan h) Meningkatnya peran Lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	
		3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kemantren Jetis	a) meningkatnya operasi ketertiban b) meningkatnya koordinasi penegakan perda dan perkada	

		4. meningkatnya sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat Kemantren Jetis	a) meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional b) meningkatnya sinergitas forkompintren	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif	1. meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Kemantren Jetis	a) Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Jetis b) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Jetis c) Meningkatnya kualitas pengelolaan asset Kemantren Jetis d) Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis e) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kemantren Jetis f) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Kemantren Jetis	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalan rangka mencapai tujuan strategis Kemantren Jetis maka langkah – langkah operasional perlu dijabarkan secara sistemats dalm bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan langkah -langkah operasional ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kemantren serta diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang dirancang secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai hasil tertentu. Program dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah serta dapat melibatkan kerjasama dengan masyarakat. Setiap program disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kemantren secara lebih luas sesuai dengan prioritas daerah

Kegiatan adalah penjavaran lebih lanjut dari program yang menjadi instrument pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Kegiatan dirancang untuk menghasilkan output yang terukur dan dampat memberikan dampak langsung bagi masyarakat maupun proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kemantren.

Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang memuat bentuk konkrit yang dilaksanakan secara langsung. Sub kegiatan mencerminkan pelaksanaan teknis di lapangan dan menjadi bagian penting dalam proses pencapaian output kegiatan.

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan digunakan indicator kinerja. Indicator ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indicator kinerja mencerminkan capaian hasil, output serta dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kemantren Jetis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra tahun 2025 – 2029 disusun sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang sudah dirumuskan sehingga setiap elemen perencanaan memiliki keterkaitan langsung dengan capaian kinerja yang diharapkan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri sehingga selaras dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Khusus untuk perencanaan tahun 2030 dinyatakan secara eksplisit bahwa pelaksanaannya merupakan bagian dari

upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah sekaligus sebagai pijakan utama penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kemantren Jetis

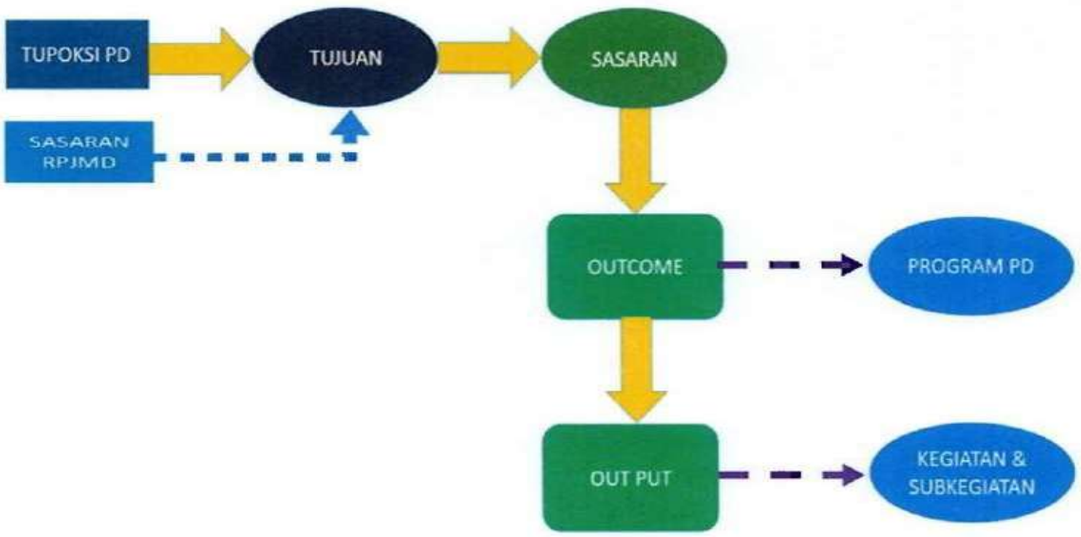

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapak dalam Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 Kegiatan dan 38 sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub kegiatan :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub kegiatan :
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan :
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub kegiatan, yaitu:
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahn, untuk kemantren dilaksanakan oleh 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja dan Jawatan Kemamkuran, terdiri dari 4 Kegiatan dan 12 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Sub kegiatan, yaitu:

   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Sub kegiatan, yaitu:

   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   2) Evaluasi Kelurahan
c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh kemantren melalui 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja dan Jawatan Kemakmuran juga dilaksanakan oleh Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan, terdiri dari 3 Kegiatan di kelurahan dan 6 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bumijo)

Sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)

Sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gowongan)

Sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

7. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Sub kegiatan :

      1) Gelar Budaya Jogja Kemantren Jetis

8. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan

      Sub kegiatan :

      1) Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Jawatan Kemakmuran)
      2) Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Bumijo)
      3) Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)
      4) Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Gowongan)

Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan renstra Kemantren Jetis disusun secara berjenjang untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan memperhatikan prioritas tahunan, kesinambungan pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dalam renstra Kemantren Jetis juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data dan

selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan renstra Kemantren Jetis dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA KEMANTREN JETIS KOTA YK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis				Indeks pembangunan Kemantren Jetis (Indeks)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis (poin)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Jetis)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Jetis		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Jetis		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangka Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gowongan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Cokrodiningratan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Bumijo)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Bumijo)	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Jetis yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Jetis (Nilai)		
			Meningkatnya nilai akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis		Nilai SAKIP Kemantren Jetis (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Jetis (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Jetis (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan merupakan bagian dari dokumen renstra perangkat daerah yang memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun lengkap dengan indicator kinerja, target tahunan dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan Pembangunan sectoral dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaannya dijelaskan pada tabel berikut ini :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Jetis)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.02.00 00 - Kemantren Jetis	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Bumijo)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.02.00 00 - Kemantren Jetis	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Cokrodiningratan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gowongan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Jetis	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				11.225.015.228		10.524.538.292		10.738.600.427		11.011.166.084		11.310.511.738		11.699.993.728		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.211.694.610		6.773.281.188		6.911.045.239		7.086.460.425		7.279.110.422		7.529.769.499		
Meningkatnya nilai akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis	Nilai SPIP Kemantren Jetis (Nilai)	4,308	4.320-4.500	7.211.694.610	4.320-4.500	6.773.281.188	4.325-4.500	6.911.045.239	4.330-4.500	7.086.460.425	4.335-4.500	7.279.110.422	4.340-4.500	7.529.769.499	7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis	
	Nilai SAKIP Kemantren Jetis (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
	Nilai IKM Kemantren Jetis (Nilai)	88,23	88,3		88,4		88,5		88,6		88,7		88,8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.118.750		5.851.700		5.970.723		6.122.260		6.288.723		6.505.309		
Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	6.118.750	5	5.851.700	5	5.970.723	5	6.122.260	5	6.288.723	5	6.505.309		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				724.000		634.000		646.896		663.314		681.349		704.815		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	724.000	3	634.000	3	646.896	3	663.314	3	681.349	3	704.815		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				488.000		865.000		882.594		904.994		929.601		961.617		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	488.000	1	865.000	1	882.594	1	904.994	1	929.601	1	961.617		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				625.000		865.000		882.594		904.994		929.601		961.617		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	625.000	1	865.000	1	882.594	1	904.994	1	929.601	1	961.617		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				904.000		814.000		830.557		851.636		874.792		904.920		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	904.000	1	814.000	1	830.557	1	851.636	1	874.792	1	904.920		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				737.000		757.000		772.397		792.001		813.535		841.553		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	737.000	1	757.000	1	772.397	1	792.001	1	813.535	1	841.553		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.628.750		1.036.700		1.057.786		1.084.633		1.114.124		1.152.495		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.628.750	5	1.036.700	5	1.057.786	5	1.084.633	5	1.114.124	5	1.152.495		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.012.000		880.000		897.899		920.688		945.721		978.292		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.012.000	4	880.000	4	897.899	4	920.688	4	945.721	4	978.292		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.561.977.500		5.032.059.000		5.134.316.592		5.264.730.688		5.407.847.856		5.594.060.646		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.561.977.500	12	5.032.059.000	12	5.134.316.592	12	5.264.730.688	12	5.407.847.856	12	5.594.060.646		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35		35		35		35		35		35			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.554.640.000		5.023.021.000		5.125.094.758		5.255.274.805		5.398.134.868		5.584.013.142		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35	5.554.640.000	35	5.023.021.000	35	5.125.094.758	35	5.255.274.805	35	5.398.134.868	35	5.584.013.142		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.320.000		2.420.000		2.469.223		2.531.892		2.600.734		2.690.303		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	12	1.320.000	12	2.420.000	12	2.469.223	12	2.531.892	12	2.600.734	12	2.690.303		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				550.000		920.000		938.713		962.537		988.709		1.022.760		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	550.000	12	920.000	12	938.713	12	962.537	12	988.709	12	1.022.760		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				550.000		575.000		586.696		601.586		617.943		639.225		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	550.000	1	575.000	1	586.696	1	601.586	1	617.943	1	639.225		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				220.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	220.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.648.000		4.673.000		4.768.049		4.889.062		5.021.995		5.194.953		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	4.648.000	12	4.673.000	12	4.768.049	12	4.889.062	12	5.021.995	12	5.194.953		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				49.500		230.000		234.678		240.634		247.177		255.690		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	49.500	1	230.000	1	234.678	1	240.634	1	247.177	1	255.690		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.401.000		5.884.000		6.003.681		6.156.054		6.323.437		6.541.217		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	6.401.000	2	5.884.000	2	6.003.681	2	6.156.054	2	6.323.437	2	6.541.217		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				550.000		550.000		561.187		575.430		591.076		611.433		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	550.000	2	550.000	2	561.187	2	575.430	2	591.076	2	611.433		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.650.000		1.380.000		1.408.069		1.443.806		1.483.063		1.534.140		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.650.000	1	1.380.000	1	1.408.069	1	1.443.806	1	1.483.063	1	1.534.140		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				880.000		828.000		844.842		866.284		889.838		920.484		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	880.000	1	828.000	1	844.842	1	866.284	1	889.838	1	920.484		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.815.000		1.815.000		1.851.917		1.898.919		1.950.550		2.017.727		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	1	1.815.000	1	1.815.000	1	1.851.917	1	1.898.919	1	1.950.550	1	2.017.727		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				396.000		391.000		398.953		409.078		420.201		434.673		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	396.000	1	391.000	1	398.953	1	409.078	1	420.201	1	434.673		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.110.000		920.000		938.713		962.537		988.709		1.022.760		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.110.000	1	920.000	1	938.713	1	962.537	1	988.709	1	1.022.760		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				660.000		660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	2	660.000	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				660.000		660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	2	660.000	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.869.460		372.693.488		380.274.074		389.925.430		400.527.502		414.321.670		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	424.869.460	1	372.693.488	1	380.274.074	1	389.925.430	1	400.527.502	1	414.321.670		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.936.900		30.828.050		31.455.093		32.253.423		33.130.393		34.271.404		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.936.900	1	30.828.050	1	31.455.093	1	32.253.423	1	33.130.393	1	34.271.404		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				139.422.960		137.045.838		139.833.350		143.382.321		147.280.886		152.353.240		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	7	139.422.960	7	137.045.838	7	139.833.350	7	143.382.321	7	147.280.886	7	152.353.240		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.120.000		15.120.000		15.427.541		15.819.092		16.249.213		16.808.836		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.120.000	1	15.120.000	1	15.427.541	1	15.819.092	1	16.249.213	1	16.808.836		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.279.600		54.869.600		55.985.648		57.406.563		58.967.448		60.998.287		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	53.279.600	2	54.869.600	2	55.985.648	2	57.406.563	2	58.967.448	2	60.998.287		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				500.000		0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	500.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				183.960.000		133.730.000		136.450.068		139.913.171		143.717.410		148.667.038		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	183.960.000	12	133.730.000	12	136.450.068	12	139.913.171	12	143.717.410	12	148.667.038		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.650.000		1.100.000		1.122.374		1.150.860		1.182.152		1.222.865		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.650.000	1	1.100.000	1	1.122.374	1	1.150.860	1	1.182.152	1	1.222.865		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		52.080.000		53.139.307		54.487.983		55.969.511		57.897.101		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	65	52.080.000	65	53.139.307	65	54.487.983	65	55.969.511	65	57.897.101		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		52.080.000		53.139.307		54.487.983		55.969.511		57.897.101		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	65	52.080.000	65	53.139.307	65	54.487.983	65	55.969.511	65	57.897.101		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				950.050.000		953.792.000		973.192.129		997.891.746		1.025.024.422		1.060.326.263		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	950.050.000	12	953.792.000	12	973.192.129	12	997.891.746	12	1.025.024.422	12	1.060.326.263		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	36		36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		3.500.000		3.571.190		3.661.827		3.761.392		3.890.934		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.750.000	12	3.500.000	12	3.571.190	12	3.661.827	12	3.761.392	12	3.890.934		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		219.000.000		223.454.460		229.125.734		235.355.663		243.461.312		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	219.000.000	12	219.000.000	12	223.454.460	12	229.125.734	12	235.355.663	12	243.461.312		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				726.300.000		731.292.000		746.166.479		765.104.185		785.907.367		812.974.017		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	726.300.000	36	731.292.000	36	746.166.479	36	765.104.185	36	785.907.367	36	812.974.017		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.617.900		350.261.000		357.475.309		366.455.748		376.419.680		389.383.574		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	261.617.900	2	350.261.000	2	357.475.309	2	366.455.748	2	376.419.680	2	389.383.574		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	164		164		164		164		164		164			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	38		38		38		38		38		38			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.748.000		27.048.000		27.598.156		28.298.598		29.068.036		30.069.140		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	1	29.748.000	1	27.048.000	1	27.598.156	1	28.298.598	1	29.068.036	1	30.069.140		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				175.238.000		175.328.000		178.984.172		183.434.506		188.422.090		194.911.347		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	19	175.238.000	38	175.328.000	38	178.984.172	38	183.434.506	38	188.422.090	38	194.911.347		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.082.000		48.582.000		49.570.158		50.828.248		52.210.269		54.008.390		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	45.082.000	164	48.582.000	164	49.570.158	164	50.828.248	164	52.210.269	164	54.008.390		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.549.900		99.303.000		101.322.823		103.894.396		106.719.285		110.394.697		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	11.549.900	2	99.303.000	2	101.322.823	2	103.894.396	2	106.719.285	2	110.394.697		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				64.686.000		95.646.000		97.591.376		100.068.427		102.788.852		106.328.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Jetis	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	116		64.686.000	116,33	95.646.000	116,67	97.591.376	117	100.068.427	117,33	102.788.852	117,67	106.328.427	7.01.4.01.2.22.02.00 00 - Kemantren Jetis	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				64.686.000		64.456.000		65.767.025		67.436.192		69.269.782		71.655.433		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2		64.686.000	1	64.456.000	1	65.767.025	1	67.436.192	1	69.269.782	1	71.655.433		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				64.686.000		64.456.000		65.767.025		67.436.192		69.269.782		71.655.433		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	1	64.686.000	1	64.456.000	1	65.767.025	1	67.436.192	1	69.269.782	1	71.655.433		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.539.400		31.190.000		31.824.351		32.632.235		33.519.070		34.672.994		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	6	7	40.539.400	7	31.190.000	7	31.824.351	7	32.632.235	7	33.519.070	7	34.672.994		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				11.430.000		3.100.000		3.163.000		3.243.459		3.331.649		3.446.391		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	11.430.000	3	3.100.000	3	3.163.000	3	3.243.459	3	3.331.649	3	3.446.391		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				29.109.400		28.090.000		28.661.351		29.388.776		30.187.421		31.226.603		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	6	5	29.109.400	7	28.090.000	7	28.661.351	7	29.388.776	7	30.187.421	7	31.226.603		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.762.885.618		3.495.541.104		3.566.638.094		3.657.166.004		3.756.588.422		3.885.948.044		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	556.533.989	194,67	543.428.126	194,67	554.481.455	195	568.554.192	195,67	584.013.184	195,67	604.126.596	7.01.4.01.2.22.02.00 00 - Kemantren Jetis	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				132.103.800		139.052.400		141.880.726		145.481.659		149.437.305		154.583.926		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15	132.103.800	15	139.052.400	15	141.880.726	15	145.481.659	15	149.437.305	15	154.583.926		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				132.103.800		139.052.400		141.880.726		145.481.659		149.437.305		154.583.926		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15	132.103.800	15	139.052.400	15	141.880.726	15	145.481.659	15	149.437.305	15	154.583.926		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.206.351.629		3.032.208.604		3.093.881.410		3.172.410.758		3.258.652.677		3.370.863.394		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	4	119.433.689	1	80.095.626	1	81.724.771	1	83.798.946	1	86.077.439	1	89.041.946		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	34	3		14		14		14		14		14			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				78.108.925		40.904.800		41.736.804		42.796.084		43.959.709		45.473.682		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	34	4	78.108.925	14	40.904.800	14	41.736.804	14	42.796.084	14	43.959.709	14	45.473.682		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				41.324.764		39.190.826		39.987.967		41.002.862		42.117.730		43.568.264		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	41.324.764	1	39.190.826	1	39.987.967	1	41.002.862	1	42.117.730	1	43.568.264		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				68.646.200		92.947.700		94.838.257		97.245.251		99.889.350		103.329.539		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	5	63.101.200	7	66.366.200	7	67.716.089	7	69.434.723	7	71.322.653	7	73.779.005		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				63.101.200		66.366.200		67.716.089		69.434.723		71.322.653		73.779.005		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	5	63.101.200	7	66.366.200	7	67.716.089	7	69.434.723	7	71.322.653	7	73.779.005		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	34	14	5.545.000	14	26.581.500	14	27.122.168	14	27.810.528	14	28.566.697	14	29.550.534		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.545.000		26.581.500		27.122.168		27.810.528		28.566.697		29.550.534		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	34	14	5.545.000	14	26.581.500	14	27.122.168	14	27.810.528	14	28.566.697	14	29.550.534		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				236.350.300		231.332.400		236.037.701		242.028.336		248.609.090		257.171.185		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	80	56.004.100	30	33.592.000	30	34.275.261	30	35.145.167	30	36.100.765	30	37.344.075		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				56.004.100		33.592.000		34.275.261		35.145.167		36.100.765		37.344.075		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	80	56.004.100	30	33.592.000	30	34.275.261	30	35.145.167	30	36.100.765	30	37.344.075		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	40	50	5.093.900	30	2.888.900	30	2.947.660	30	3.022.472	30	3.104.653	30	3.211.577		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5.093.900		2.888.900		2.947.660		3.022.472		3.104.653		3.211.577		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	40	50	5.093.900	30	2.888.900	30	2.947.660	30	3.022.472	30	3.104.653	30	3.211.577		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	90	50		30	194.851.500	30	198.814.780	30	203.860.697	30	209.403.672	30	216.615.533		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	50		30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50	175.252.300	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	50		30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30	50		30		30		30		30		30			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				61.158.000		75.107.000		76.634.676		78.579.664		80.716.246		83.496.113		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	50	61.158.000	30	75.107.000	30	76.634.676	30	78.579.664	30	80.716.246	30	83.496.113		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4.850.000		1.725.000		1.760.087		1.804.757		1.853.829		1.917.675		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	50	4.850.000	30	1.725.000	30	1.760.087	30	1.804.757	30	1.853.829	30	1.917.675		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				4.384.800		6.665.000		6.800.566		6.973.164		7.162.765		7.409.450		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30	50	4.384.800	30	6.665.000	30	6.800.566	30	6.973.164	30	7.162.765	30	7.409.450		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				19.330.000		31.835.000		32.482.524		33.306.930		34.212.546		35.390.826		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	90	65	19.330.000	30	31.835.000	30	32.482.524	30	33.306.930	30	34.212.546	30	35.390.826		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				85.529.500		79.519.500		81.136.927		83.196.182		85.458.286		88.401.469		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50	85.529.500	30	79.519.500	30	81.136.927	30	83.196.182	30	85.458.286	30	88.401.469		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33		995.014.901	194,67	908.122.338	194,67	926.591.230	195	950.114.752	195,67	975.932.443	195,67	1.009.526.276		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.206.351.629		3.032.208.604		3.093.881.410		3.172.410.758		3.258.652.677		3.370.863.394		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	183	183	547.334.950	183	460.572.950	183	469.941.004	183	481.868.106	183	494.970.100		512.016.871		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				547.334.950		460.572.950		469.941.004		481.868.106		494.970.100		512.016.871		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	183	183	547.334.950	183	460.572.950	183	469.941.004	183	481.868.106	183	494.970.100		512.016.871		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	114	42	447.679.951	35	447.549.388	35	456.650.226	35	468.246.646	35	480.962.343	35	497.509.405		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				447.679.951		447.549.388		456.650.226		468.246.646		480.962.343		497.509.405		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	114	42	447.679.951	35	447.549.388	35	456.650.226	35	468.246.646	35	480.962.343	35	497.509.405		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	712.365.445	194,67	972.991.300	194,67	992.781.943	195	1.017.978.749	195,67	1.045.657.591	195,67	1.081.670.038		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.206.351.629		3.032.208.604		3.093.881.410		3.172.410.758		3.258.652.677		3.370.863.394		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	151		549.351.250	183	635.229.000	183	648.149.558	183	664.599.594	183	682.670.057	183	706.181.213		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				549.351.250		635.229.000		648.149.558		664.599.594		682.670.057		706.181.213		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	151	197	549.351.250	183	635.229.000	183	648.149.558	183	664.599.594	183	682.670.057	183	706.181.213		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15	148	163.014.195	55	337.762.300	55	344.632.385	55	353.379.155	55	362.987.534	55	375.488.825		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				163.014.195		337.762.300		344.632.385		353.379.155		362.987.534		375.488.825		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15	148	163.014.195	55	337.762.300	55	344.632.385	55	353.379.155	55	362.987.534	55	375.488.825		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	1.074.541.094	194,67	1.070.999.340	194,67	1.092.783.466	195	1.120.518.311	195,67	1.150.985.204	195,67	1.190.625.134		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.206.351.629		3.032.208.604		3.093.881.410		3.172.410.758		3.258.652.677		3.370.863.394		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	23	378	581.032.700	183	695.012.800	183	709.149.360	183	727.147.571	183	746.918.714	183	772.642.594		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				581.032.700		695.012.800		709.149.360		727.147.571		746.918.714		772.642.594		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	23	378	581.032.700	183	695.012.800	183	709.149.360	183	727.147.571	183	746.918.714	183	772.642.594		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	185	156	493.508.394	45	375.986.540	45	383.634.106	45	393.370.740	45	404.066.490	45	417.982.540		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				493.508.394		375.986.540		383.634.106		393.370.740		404.066.490		417.982.540		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	185	156	493.508.394	45	375.986.540	45	383.634.106	45	393.370.740	45	404.066.490	45	417.982.540		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				77.267.000		72.285.000		73.755.229		75.627.274		77.683.250		80.358.304		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100	77.267.000	100	72.285.000	100	73.755.229	100	75.627.274	100	77.683.250	100	80.358.304	7.01.4.01.2.22.02.00 00 - Kemantren Jetis	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				77.267.000		72.285.000		73.755.229		75.627.274		77.683.250		80.358.304		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada						0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	5	12	77.267.000	12	72.285.000	12	73.755.229	12	75.627.274	12	77.683.250	12	80.358.304		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				77.267.000		72.285.000		73.755.229		75.627.274		77.683.250		80.358.304		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	5	12	77.267.000	12	72.285.000	12	73.755.229	12	75.627.274	12	77.683.250	12	80.358.304		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				108.482.000		87.785.000		89.570.489		91.843.954		94.340.792		97.589.454		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	108.482.000	100	87.785.000	100	89.570.489	100	91.843.954	100	94.340.792	100	97.589.454	7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				108.482.000		87.785.000		89.570.489		91.843.954		94.340.792		97.589.454		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50	50	80.822.000	50	67.530.000	50	68.903.560	50	70.652.333	50	72.573.369	50	75.072.796		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80.822.000		67.530.000		68.903.560		70.652.333		72.573.369		75.072.796		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50	50	80.822.000	50	67.530.000	50	68.903.560	50	70.652.333	50	72.573.369	50	75.072.796		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	12	27.660.000	12	20.255.000	12	20.666.929	12	21.191.621	12	21.767.423	12	22.516.658		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				27.660.000		20.255.000		20.666.929		21.191.621		21.767.423		22.516.658		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	12	27.660.000	12	20.255.000	12	20.666.929	12	21.191.621	12	21.767.423	12	22.516.658		

4.3 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program – program unggulan dari Walikota terpilih, meliputi :

I. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan :
   a. Satu keluarga miskin satu sarjana
   b. Pengarusutamaan kurikulum kepribadian
   c. Penumbuhan wirausaha muda

II. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan Kesehatan rakyat melalui program unggulan :
   a. Posyandu paripurna : Gerakan warga sehat
   b. Kartu keluarga : jaminan Kesehatan warga
   c. Satu kamung satu bidan

III. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk ekonomi rakyat melalui program unggulan :
   a. Bela beli produk warga
   b. Pemajuan ekonomi kreatif
   c. Modernisasi pasar rakyat

IV. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui program unggulan :
   a. Revitalisasi kampung wisata
   b. Ekonomi olahraga
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan

V. Meningkatkan kualitas layanan public dan kepastian hukum melalui program unggulan :
   a. ASN Sejahtera : peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas dan bersih dari korupsi
   b. Penataan kelembagaan yang adaptif
   c. Perlindungan hukum bagi warga

VI. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui program unggulan :
   a. Bapak asuh keluarga miskin
   b. Kampung layak huni
   c. Pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan

VII. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY melalui program unggulan :
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan Sebagian urusan keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan Masyarakat

c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan

d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan, kepentingan sosial dan pengembangan kebudayaan

e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

VIII. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga melalui program unggulan :

a. Mempercepat penyelesaiaan masalah sampah

b. Kota hijau, sehat dan berkelanjutan

c. Jogja Tangguh Bencana

Keterkaitan program strategis dari Walikota terpilih dengan program prioritas dari Kemantren Jetis terurai dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis					
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Jetis	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk ekonomi rakyat	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Bumijo)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Jetis	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NO	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
				7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3.	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NO	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
4.	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategi perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam renstra perangkat daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. IKU Kemantren Jetis sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.02.0000 - Kemantren Jetis									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Jetis	Nilai	519,4	520,2	520,93	521,93	522,93	523,93	524,93	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Jetis	Nilai	A	A	A	A	AA	AA	AA	
4.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	poin	404	405	405,67	406,67	407,67	408,67	409,67	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pogram dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi yang dimiliki (kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang).

Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 dan menjadi pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar supaya dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arah yang jelas dan tidak bertentangan dengan Rencan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan dapat diawasi serta berpijak pada pedoman yang sudah ditetapkan. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya akan diukur engan tingkat capaian target kinerja dimana rumusan indicator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur Kemantren Jetis Kota Yogyakarta karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang diperlukan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin diraih.

Demikian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN

POHON KINERJA
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH
Meningkatnya Kebersbayaan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
Indeks Kebersbayaan Masyarakat

TUJUAN OPD
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis
INDIKATOR KINERJA
Indeks pembangunan Kemantren Jetis

Sasaran Kemantren Jetis (1) :
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis
Indikator Kinerja :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis

Sasaran Kemantren Jetis (2) :
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif
Indikator Kinerja :
Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren
Indikator Kinerja :
Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan

*4)

Initial Outcome : Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis
Indikator : Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik

Output : Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Indikator : Jumlah dokumen koordinasi yang dilaksanakan

*a)

Initial Outcome : Meningkatnya Penguna Layanan yang Terfasilitasi
Indikator : Persentase penguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP

Output : Terlaksananya Unsur Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan
Indikator : Jumlah dokumen pelayanan perizinan non usaha

Output : Terlaksananya Unsur Pemerintahan yang terkait dengan
Indikator : Jumlah laporan pelayanan non perizinan

*b)

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD
1	Dindukcapil
2	DPMPTSP
3	Diskominfosan

Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
Indikator Kinerja :
Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan

*5)

Initial Outcome : Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
Indikator : Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan

Output : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Indikator : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat

*c)

Initial Outcome : Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Tertangun
Indikator : Persentase sarana prasarana terbangun

Output : Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator : Jumlah sarpras yang terbangun yang dilaksanakan

*d)

Initial Outcome : Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan
Indikator : Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan

*e)

Initial Outcome : Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan
Indikator : 1. Presentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan
2. Presentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Output : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Indikator : Jumlah Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Output : Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga

Output : Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup

*f)

Initial Outcome : Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan
Indikator : Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan

Output : Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Output : Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan

Output : Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan

*g)

Initial Outcome : Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana
Indikator : Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana

Output : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Indikator : Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam

*h)

Initial Outcome : Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator : Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat

Output : Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

*i)

Initial Outcome : Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Keluruhan
Indikator : Jumlah Dokumen Musrenbang dan Jumlah Dokumen Evaluasi Keluruhan

Output : Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang

Output : Terlaksananya Evaluasi Keluruhan
Indikator : Jumlah dokumen evaluasi keluruhan yang sesuai dengan Permendagri

*j)

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis
Indikator Kinerja :
Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti

*6)

Initial Outcome : Meningkatnya operasi ketertiban
Indikator : Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP

Output : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang
Indikator : Jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP

*k)

Initial Outcome : Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada
Indikator : Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP

Output : Terlaksananya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada
Indikator : Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan

*k)

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren
Indikator Kinerja :
Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti

*4)

Initial Outcome : Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Indikator : Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Output : Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Indikator : Jumlah orang Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

*l)

Initial Outcome : Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren
Indikator : Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perugasan
Indikator : Jumlah Dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

*l)

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1.	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2.	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3.	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4.	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama
5.	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6.	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7.	Kesbangpol	Dukungan peningkatan wasbang

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kemantren Jetis
Indikator Kinerja :
Nilai SAKIP Kemantren Jetis
Nilai SPIP Kemantren Jetis

Initial Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan, penanggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Jetis
Indikator :
1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis
2. Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Jetis

Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah

Output : Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator : Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD

Output : Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
Indikator : Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD

Output : Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Indikator : Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD

Output : rersedanya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD
Indikator : Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator : Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah laporan Evaluasi Kinerja

Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Jetis
Indikator Kinerja :
Nilai penguatan keuangan dan aset

*5)

Initial Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Kemantren Jetis
Indikator : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Jetis

Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Output : Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output : Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan

Output : tersedanya dokumen sanan Tanggapan Pemeriksanaan dan tindak lanjut
Indikator : Jumlah dokumen sanan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan

Output : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis
Indikator : Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	BPKAD	Penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan

Initial outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis
Indikator :
Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis

Output : Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun

Output : Terselenggaranya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Output : Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah SKPD
Indikator : Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah SKPD dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah

Output : Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Output : rehasanahnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Indikator : Jumlah laporan Rekonsiliasi dan

Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator : Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Output : Tersedianya Mebel
Indikator : Jumlah Unit mebel yang disediakan

Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan

Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas
Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Output : Tersedianya pemeliharaan mebel
Indikator : Jumlah mebel yang dipelihara

Output : Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	BPKAD	Penyusunan RKBMD dan laporan barang persediaan dan aset

Meningkatnya kualitas pelayanan Kemantren Jetis
Indikator Kinerja :
Nilai IKM Kemantren Jetis

Initial Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis
Indikator : Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Jetis

Output : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang terlaksana

Initial Outcome : Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Jetis
Indikator : Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Jetis

Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator : Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Indikator : Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator : Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Indikator : jumlah undang-undang beserta eraturan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan

Output : Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator : Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Indikator : Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Initial Outcome : Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Jetis
Indikator : Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Indikator : Jumlah laporan jasa surat menyurat yang disediakan

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Dag	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Bud	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sos	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	DLH	Dukungan penanganan persampahan
8	Dinkes	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DP3AP2KB	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
10	DPUPKP	Dukungan satpras
11	Din Dikpora	Dukungan penanganan pendidikan

Kode	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pengampu
*1)	Program : Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
*2)	Program : Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
*3)	Program : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
*4)	Program : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
*a)	Kegiatan : Pemeliharaan sarana prasarana umum	
	Sub keg : Koordinasi/sinergi dg perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jawatan Kemakmuran
*b)	Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yg dilimpahkan kpd camat	
	Sub Keg : Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg pelayanan perizinan non usaha	Jawatan Umum
	Sub Keg : Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg non perizinan	Jawatan Umum
	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat kelurahan	
*c)	Sub keg : Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Kelurahan
*d)	Sub keg : Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	3 Kelurahan
*e)	Kegiatan : Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tk kecamatan	
	Sub keg : Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jawatan Praja
*f)	Kegiatan : Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tk kecamatan	
	Sub keg : Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jawatan Kemakmuran
	Sub keg : Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jawatan Kemakmuran
	Sub keg : Penumbuhan kesadaran keluarga dlm peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jawatan Kemakmuran
*g)	Kegiatan : Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk Kec & Kel	
	Sub keg : Penumbuhan kesadaran keluarga dlm peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dg menerapkan PHBS	Jawatan Sosial
	Sub keg : Peningkatan kesadaran keluarga dlm peningkatan pendidikan dan ketrampilan utk mewujudkan SDM yg berkualitas dan berdaya saing	Jawatan Sosial
	Sub keg : Penumbuhan kesadaran keluarga dlm peningkatan taraf hidup keluarga mll kehidupan berkoperasi dan pengembangan usaha	Jawatan Sosial
	Sub keg : Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dlm keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jawatan Sosial
*h)	Kegiatan : Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk Kec & Kel	
	Sub keg : Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jawatan Keamanan
*i)	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat kelurahan	
	Sub keg : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jawatan Sosial
*j)	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat kelurahan	
	Sub keg : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jawatan Praja
	Sub keg : Evaluasi kelurahan	Jawatan Praja
*k)	Kegiatan : Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	
	Sub keg : Koordinasi/sinergi dg perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bid penegakan peraturan perUUan dan/atau POLRI	Jawatan Keamanan
*l)	Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai perugasan kepala daerah	
	Sub keg : Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jawatan Praja
	Sub keg : Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jawatan Keamanan

Crosscutting ketuasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan:
1.	BPKAD	Penyusunan anggaran
2.	BAPPEDA	Penyusunan rencana kerja
3.	Diskominfosan	Penyusunan data statistik sektoral
4.	Bagian Administrasi & Pembangunan	Penyusunan laporan capaian kinerja fisik dan

CASCADING KEMANTREN JETIS TAHUN 2021-2026

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Kemantren Jetis	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis	Indeks pembangunan Kemantren Jetis	80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	520,20	520,93	521,33	522,83	523,93	524,93	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (89,540-90,00)	A (89,768-90,00)	A (89,999-90,00)	A (90,230-100,00)	AA (90,454-100,00)	AA (90,500-100,00)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Nilai SAKIP Kemantren Jetis	Sekretariat	A (84,02-86,02)	A (84,06-86,06)	A (84,08-86,08)	A (86,10-88,10)	A (84,12-86,12)	A (84,15-86,15)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Jetis	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang wajib disusunkx 100%	Sub. Bag Keu PEP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Bag Keu PEP	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
																						Nilai SPIP Kemantren Jetis		Terkelola dan terukur (4,308 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,320 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,325 - 4,500)	Terkelol a dan terukur (4,330 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,335 - 4,500)	Terkelol a dan terukur (4,340 - 4,500)			Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Jetis	Jumlah data statistik yang diverifikasi sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																						Nilai IKM Kemantren Jetis		88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,8															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	emendianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sub.Bag Keu PEP	laporan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
																																											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	Sub.Bag Keu PEP	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
																										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Jetis	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Jetis	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Jetis oleh BPKAD	Sub. Bag Keu PEP	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai																																Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub.Bag Keu PEP	37 orang/bulan	37 orang/bulan	37 orang/bulan	37 orang/bulan	37 orang/bulan	37 orang/bulan
																																											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi	Sub.Bag Keu PEP	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
																																											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD.	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Sub.Bag Keu PEP	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan- Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub.Bag Keu PEP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
																																											Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Sub.Bag Keu PEP	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																																											Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Jetis	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Jetis	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai																																Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
																																											Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																											Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
																																											Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3 laporan	2 laporan
																																											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
																																											Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Jetis	Hasil penilaian IP ASN Kemantren Jetis oleh BKPSDM	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	83,58 nilai	83,58 nilai	83,58 nilai	83,58 nilai	83,58 nilai	83,58 nilai																																Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
																										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Jetis	Pentingan pengarsipan arsip Administrasi Umum Kemantren Jetis	Hasil penilaian pengarsipan arsip administrasi umum	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	78,22 nilai	78,22 nilai	78,22 nilai	78,22 nilai	78,22 nilai	78,22 nilai																																Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
																																											Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
																																											Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
																																											Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
																																											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																																											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Jetis	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Jetis	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai																																Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	91 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																																											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	35 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Jetis	Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis	Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi jumlah rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis x 100%	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat secara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
																																											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																																											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor secara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Jetis	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Jetis	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai																																Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan secara efektifdan efisien	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
																																											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit
																																											Pemeliharaan Meubel	Terlaksananya Pemeliharaan Meubel	Jumlah meubel yang dipelihara	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	27 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																																											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	44 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																																											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya secara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelerihara / direhabilitasi	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	7 unit	unit	unit	unit	unit	unit
											Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis riumlah nilai perkembangan pembangunan Kemantren Jetis x	405	405,67	406,67	407,67	408,67	408,67	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum	116	116,33	116,67	117	117,33	117,67	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis	Tersedianya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis	Jawatan Kemakmuran	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen
																																											Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	Jawatan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jawatan Umum	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
																																											Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jawatan Umum	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	12 dokumen
																				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Kemantren	194,33	194,67	194,67	195,00	195,67	195,67	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga	Jawatan Sosial	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Sosial	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
																															Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen	Jawatan Praja	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jawatan Praja	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga
																																- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jawatan Praja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
																							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bumijo	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Kelurahan Bumijo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bumijo	Kelurahan Bumijo	99 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																								Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo	Kelurahan Bumijo	142 pokmas	142 pokmas	142 pokmas	142 pokmas	142 pokmas	142 pokmas
																							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Kelurahan Cokrodiningratan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Cokrodiningratan	Kelurahan Cokrodiningratan	184 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																								Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cokrodiningratan	234 pokmas	234 pokmas	234 pokmas	234 pokmas	234 pokmas	234 pokmas
																							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gowongan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Kelurahan Gowongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gowongan	Kelurahan Gowongan	156 unit	unit	unit	unit	unit	unit
																								Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gowongan	Kelurahan Gowongan	232 pokmas	232 pokmas	232 pokmas	232 pokmas	232 pokmas	232 pokmas
																							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Praja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jawatan Praja	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga
																								Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilasna	Jawatan Kemakmuran	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga
																							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jawatan Kemakmuran	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																								Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jawatan Sosial	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																								Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jawatan Sosial	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																								Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Kemakmuran	-	100%	100%	100%	100%	100%	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kemakmuran	-	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																								Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase lembaga kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	Jawatan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Keamanan	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	Jawatan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang direncanakan x 100 %	Jawatan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jawatan Keamanan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																								Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%																		

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN JETIS
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis	Indeks pembangunan Kemantren Jetis	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunkan nilai yang diperoleh dari SIM Evdeskel - menggunakan nilai evaluasi kinerja kemantren (EKK)				80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	519,40	520,20	520,93	521,93	522,93	523,93	523,93	524,93
						sumber data :									
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bumijo	Poin	404	404	405	406	407	408	408	409
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Cokrodiningratan	Poin	404	407	407	408	409	410	410	411
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gowongan	Poin	404	404	405	406	407	408	408	409
						Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Jetis	Poin	981	981	982	983	984	985	985	986
			1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis = jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	404	405	405,67	406,67	407,67	408,67	408,67	409,67
						sumber data :									
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bumijo	Poin	404	404	405	406	407	408	408	409
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Cokrodiningratan	Poin	404	407	407	408	409	410	410	411
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gowongan	Poin	404	404	405	406	407	408	408	409
						Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target
			1.2. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Jetis yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Jetis	mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai	A (89,288)	A (89,540 - 90,000)	A (89,768 - 90,000)	A (89,999 - 90,000)	AA (90,230 - 100,000)	AA (90,456 - 100,000)	AA (90,456 - 100,000)	AA (90,500 - 100,000)
						sumber data : Hasil penilaian RB Kemantren Jetis oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (89,288)	A (89,540 - 90,000)	A (89,768 - 90,000)	A (89,999 - 90,000)	AA (90,230 - 100,000)	AA (90,456 - 100,000)	AA (90,456 - 100,000)	AA (90,500 - 100,000)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN JETIS
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	116,00	116,00	116,33	116,67	117,00	117,33	117,33	117,67	FALSE	informasi target pada cascading tidak ada
									Sumber data :										FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bumijo	Poin	116	116	117	117	117	118	118	118	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Cokrodiningratan	Poin	116	116	116	116	117	117	117	117	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gowongan	Poin	116	116	116	117	117	117	117	118	FALSE	
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik		Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									- sarpras pelayanan umum berkondisi baik	unit	314								FALSE	
									- total sarpras	unit	314								FALSE	
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									- jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	layanan	831								FALSE	
									- jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi	layanan	831								FALSE	
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	194,33	194,33	194,67	194,67	195,00	195,67	195,67	195,67	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bumijo	Poin	194	194	194	194	195	195	195	195	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Cokrodiningratan	Poin	197	197	197	197	197	198	198	198	FALSE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gowongan	Poin	192	192	193	193	193	194	194	194	FALSE	
									Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	lembaga	15	15	15	15	15	15	15	15	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	15	15	15	15	15	15	15	15	FALSE	
																			FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
									sumber data :										FALSE	
									Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	FALSE	
							- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		Jumlah Dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									sumber data :										FALSE	
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bumijo	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	122								FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	122								FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	234								FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	234								FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	212								FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	212								FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	197								FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	197								FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gowongan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	185								FALSE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	185								FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	232								FALSE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	232								FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	215	215	215	215	215	215	215	215	FALSE	
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	215	215	215	215	215	215	215	215	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	3	3	3	3	3	3	3	3	FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	3	3	3	3	3	3	3	3	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.2.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	16	16	16	16	16	16	16	16	FALSE	
									lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	16	16	16	16	16	16	16	16	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	49	49	49	49	49	49	49	49	FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	49	49	49	49	49	49	49	49	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang dilaksanakan	lembaga	33	33	33	33	33	33	33	33	FALSE	
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang direncanakan	lembaga	33	33	33	33	33	33	33	33	FALSE	
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									sumber data :										FALSE	
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	angka	56								FALSE	
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	angka	56								FALSE	
																			FALSE	
					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data:										FALSE	
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
																			FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren dibagi hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti) x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	terdapat perbedaan pada indikator kinerja
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									Jumlah hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
																			FALSE	
					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
									jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	
																			FALSE	
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah koordinasi forkompintren yang dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
									Jumlah koordinasi forkompintren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	FALSE	
																			FALSE	
1.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif	1.2.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Meningkatnya nilai akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis	Nilai SAKIP Kemantren Jetis	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (84,02)	A (84,02 - 89,02)	A (84,06 - 89,06)	A (84,08- 89,08)	A (84,10- 89,10)	A (84,12- 89,12)	A (84,12- 89,12)	A (84,15- 89,15)	FALSE	
									sumber data :										FALSE	
									Hasil nilai SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (84,02)								FALSE	
																			FALSE	
			Nilai SPIP Kemantren Jetis						Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola & terukur (4,308)	Terkelola & terukur (4,308 - 4,500)	Terkelola & terukur (4,320 - 4,500)	Terkelola & terukur (4,325- 4,500)	Terkelola & terukur (4,330- 4,500)	Terkelola & terukur (4,335- 4,500)	Terkelola & terukur (4,335- 4,500)	Terkelola & terukur (4,340- 4,500)	FALSE	
									sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	nilai	Terkelola & terukur (4,308)								FALSE	
																			FALSE	
			Nilai IKM Kemantren Jetis						Nilai survey indeks kepuasan masyarakat	Nilai	88,23	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,7	88,8	FALSE	
									sumber data :										FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									Nilai survey indeks kepuasan masyarakat	nilai	88,23								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Jetis	Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren jetis yang wajib disusun x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang disusun tepat waktu	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13	FALSE	
									jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang wajib disusun	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13	FALSE	
																			FALSE	
							Persentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Jetis		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Data									FALSE	
									jumlah data statistik sektoral	Data									FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Jetis	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Jetis		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Jetis	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Jetis		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Jetis oleh BKPSDM	Nilai	84,66	84,66	84,66	84,66	84,66	84,67	84,67	84,68	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Jetis oleh BKPSDM	Nilai	84,66								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Jetis		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	89,99	89,99	90,03	90,05	90,07	90,09	90,09	90,10	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	89,99								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis		Jumlah belanja Kemantren Jetis yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Jetis dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE	
									Sumber data :										FALSE	

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									Jumlah belanja Kemantren Jetis yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	12.514								FALSE	
									Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis	Rupiah	12.514								FALSE	
																			FALSE	
					1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Jetis	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE	
									sumber data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Jetis oleh BPKAD	Nilai	5									

RENCANA STRATEGIS

KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA

2025 - 2029

Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur no. 32 Yogyakarta
(0274) 520234
gk@jogjakota.go.id
https://gondokusumankec.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjabarkan langkah-langkah dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2025-2029, bagi Kemantren Gondokusuman dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Kemantren Gondokusuman, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini juga merupakan implementasi dari visi misi Wali Kota, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah. Renstra Kemantren Gondokusuman tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat Kemantren gondokusuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

Rencana Stratgis Kemantren Gondokusuman disiapkan sebagai dokumen perencanaan yang integral dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kerja yang terencana, terpadu, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan berkelanjutan Kemantren Gondokusuman tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 15 September 2025
Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, A.P., M.I.P.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197507101995011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 18
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 30
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.2.2. Isu Strategis 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36
3.1. Tujuan dan Sasaran 36
3.2. Penahapan Renstra 37
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan 39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 40
4.2. Program Prioritas 71
BAB V PENUTUP 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren 10
Gambar 2.2 Diagram Proporsi Pegawai 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Kemantren Gondokusuman 18
Tabel 2.2 Data PNS yang sudah mengikuti Diklat Penjenjangan..... 25
Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 25
Tabel 2.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon 25
Tabel 2.5 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kemantren Gondokusuman 26
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
Tabel 2.7 Penyandingan Program RPJMD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020..... 29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 37
Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD 37
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 39
Tabel 4.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 43
Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah 52
Tabel 4.3 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah..... 73
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD..... 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 telah habis pada tahun 2025 dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah RPJMD 2025-2029 No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Peragkat Daerah Tahun 2025-2029. Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Tahun 2025 - 2029 oleh seluruh OPD di Kota Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Perangkat Daerah sangat penting bagi Kemantren Gondokusuman dan masyarakat, maka penyusunan Rancangan Awal Renstra Kemantren Gondokusuman dilakukan secara integratif dan komprehensif yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rancangan Awal Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondokusuman disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki fungsi sebagai:

a. Alat dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang;
b. Digunakan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
c. Sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
d. Sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
e. Menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Dalam proses penyusunan Renstra tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Rancangan Awal Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman. Sejajar dengan itu, muatan Rancangan awal Renstra Kemantren Gondokusuman juga memperhatikan pula hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan 2025 - 2029 yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta selama satu tahun anggaran.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renstra Tahun 2025 - 2029 ini berpedoman pada hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2023 - 2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Rancangan awal Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 ;
2. Rancangan Awal Renstra Tahun 2025 - 2029 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2025 - 2029;
3. Rancangan Awal Renstra Tahun 2025 - 2029 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) ; Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan awal Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Kemantren Gondokusuman sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melakukan penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 38 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang berfungsi sebagai acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi, serta menentukan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi. Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
b. Sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai tugas dan fungsinya;
c. Sebagai penentu arah dan kebijakan organisasi dalam mencapai visi misinya;
d. Sebagai dasar mengukur kinerja organisasi, sehingga dapat mengevaluasi pencapaian tujuan yang perlu ditingkatkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029;
b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk kurun waktu tahun 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahn dan Isu Strategis

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasarn Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang tujuan dari perumusan permasalahan dan identifikasi permasalahan pembangunan beserta dengan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1.

3.2 Penahapan Renstra

Pada bagian ini dikemukakan tahapan pembangunan yang dugunakna untuk mencapai tujuan dan sasarn perangkat daerah

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yaitu dari Tabel 3.3

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, rencana pendanaan dan indicator kinerja perangkat daerah

BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren dalam kedudukan dan fungsinya memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi, dan mendukung keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan Kemantren yang mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kemantren Gondokusuman berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Secara spesifik tugas dan fungsi Kemantren telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kemantren Gondokusuman dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemantren Gondokusuman menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
a. Mantri Pamong Praja;
b. Sekretariat terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Kemakmuran;
e. Jawatan Umum;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Keamanan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren

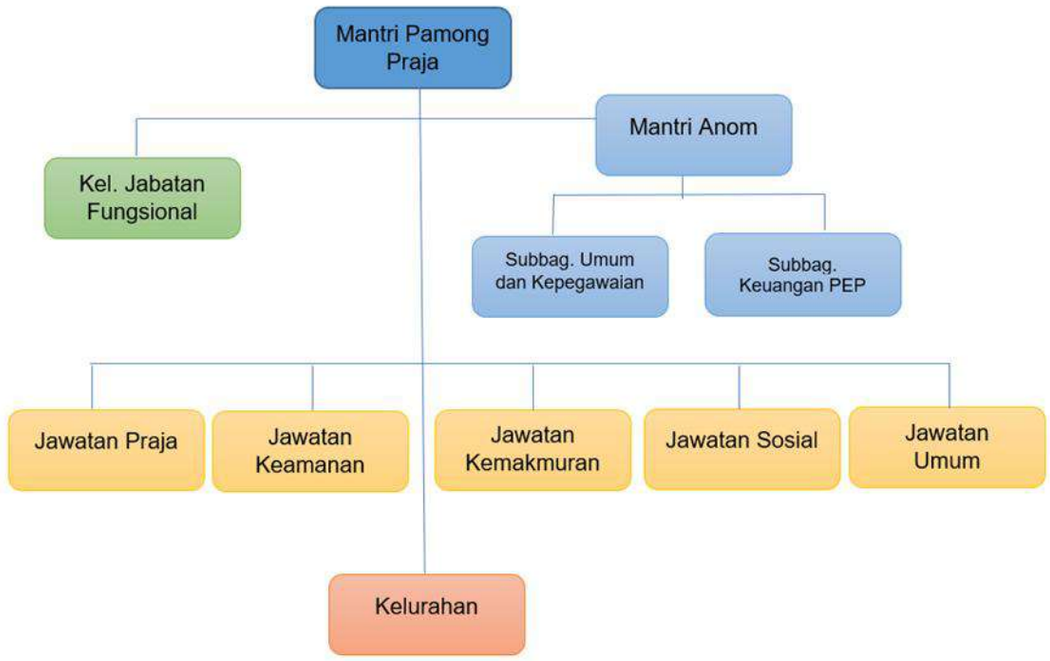

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kemantren;
l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;

o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
d. pengelolaan aset Kemantren;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan,perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan,evaluasi, dan pelaporan;
c. penatausahaan keuangan Kemantren;
d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;

f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
c. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
g. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
h. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
i. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
j. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;

k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
l. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
m. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
a. m.pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundangundangan lainnya;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;

i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Jawatan Umum

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;

g. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
h. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
j. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
k. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kelurahan

Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja. Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
f. Kelompok jabatan fungsional.

Kelurahan mempunyai tugas membantu Kemantren dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi membantu Kemantren dalam melaksanakan:

a. penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;
b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum pada tingkat Kelurahan;
c. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan pada tingkat Kelurahan;
d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;

e. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;
f. pengoordinasian upaya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
g. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di tingkat Kelurahan;
h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan Kelurahan;
i. pelaksanaan sebagian kewenangan Mantri Pamong Praja yang dilimpahkan kepada Lurah;
j. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan;
k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kelurahan;
l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan;
m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kelurahan;
n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kelurahan;
o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelurahan;
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi, Kemantren Gondokusuman didukung oleh 46 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 Naban dan 4 Tenaga Teknis. Adapun komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Pegawai Kemantren Gondokusuman

No	Nama Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	L	P
A	**Jabatan Struktural**						
	Kemantren Gondokusuman						
1	Mantri Pamong Praja	1	S1	1	S2	1	
2	Mantri Anom	1	S1	1	S2	1	

3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	1	
4	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1	1	S1		1
5	Kepala Jawatan Praja	1	S1	1	S2		1
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	S1	1	D3	1	
7	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	S1	1	S1		1
8	Kepala Jawatan Sosial	1	S1	1	S2		1
9	Kepala Jawatan Umum	1	S1	1	S1		1
	Jumlah	9		9		4	5
	Kelurahan Demangan						
1	Lurah	1	S1	1	S1	1	
2	Sekretaris Kelurahan	1	S1,D3	1	S1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	1	S1,D3	1	S1	1	
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	S1,D3	1	D3	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S1,D3	1	S1	1	
	Jumlah	5		5		4	1
	Kelurahan Kotabaru						
1	Lurah	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Kelurahan	1	S1,D3	1	S1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	1	S1,D3	1	S1	1	
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	S1,D3	1	S1	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S1,D3	1	S1		1
	Jumlah	5		5		3	2

	Kelurahan Klitren						
1	Lurah	1	S1	1	S1	1	
2	Sekretaris Kelurahan	1	S1,D3	1	S2		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	1	S1,D3	1	S1	1	
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	S1,D3	1	S2		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S1,D3	1	SMA		1
	Jumlah	5		5		2	3
	Kelurahan Baciro						
1	Lurah	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Kelurahan	1	S1,D3	1	S1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	1	S1,D3	1	S2	1	
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	S1,D3	1	SMA		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S1,D3	1	D3	1	
	Jumlah	5		5		3	2
	Kelurahan Terban						
1	Lurah	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Kelurahan	1	S1,D3	1	D3	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	1	S1,D3	1	S1	1	
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	S1,D3	1	D3		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S1,D3	0	--		0
	Jumlah	5		4		3	1
B	**Jabatan Pelaksana**						

	Kemantren Gondokusuman						
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
1	Pengadministrasi Umum	1	SLTA/D1 /D2/D3				
2	Pengadministrasi Kepegawaian	1	SLTA/D1 /D2/D3	1	SMA		1
3	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Petugas Keamanan	6	SLTA/D1 /D2/D3				
5	Pengelola Teknologi Informasi	1	SLTA/D1 /D2/D3	1	D3	1	
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	11		2		1	1
	Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan						
1	Bendahara	1	D3	0	--		0
2	Pegelola Akuntansi	1	D3				
3	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	D3	1	S1		1
4	Pengelola Data Laporan Kas	1	D3				
5	Verifikator Keuangan	2	D3	1	D3	1	
	Jumlah	6		2		1	1
	Jawatan Praja						
1	Analis Pemerintah Daerah	1	S1/D4				
2	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	1	D3				
	Jumlah	2		0		0	0
	Jawatan Keamanan						
1	Analis Keamanan	1	S1/D4				
2	Pengelola Keamanan dan	2	D3	1	SMA	1	

	Ketertiban						
	Jumlah	3				1	
	Jawatan Kemakmuran						
1	Analis Pembangunan	1	S1/D4				
2	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	2	D3	1	D3		1
3	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	3	D3				
	Jumlah	6		1			1
	Jawatan Sosial						
1	Analis Pemberdayaan Masyarakat	1	S1/D4	1	S1	1	
2	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1	D3	1	D3	1	
	Jumlah	2		2		2	
	Jawatan Umum						
1	Analis Dokumen Perizinan	1	S1/D4	1	S1		1
2	Pengelola Dokumen Perizinan	1	D3	1	D3	1	
3	Pengelola Sistem Informasi Perizinan	1	D3				
	Jumlah	3		2		1	1
	Kelurahan Demangan						
1	Bendahara	1	D3				
2	Pengelola Monitorig dan Evaluasi	1	D3				
3	Pengadministrasi Umum	1	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Pengadministrasi Keuangan	2	SLTA/D1 /D2/D3				
5	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1				

			/D2/D3				
6	Pramu Keamanan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	7		0		0	0
	Kelurahan Kotabaru						
1	Bendahara	1	D3				
2	Pengelola Monitorig dan Evaluasi	1	D3				
3	Pengadministrasi Umum	1	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Pengadministrasi Keuangan	2	SLTA/D1 /D2/D3	1	SMA	1	
5	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
6	Pramu Keamanan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	7		1		1	
	Kelurahan Klitren						
1	Bendahara	1	D3				
2	Pengelola Monitorig dan Evaluasi	1	D3				
3	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Pengadministrasi Keuangan	2	SLTA/D1 /D2/D3	1	SMA	1	
5	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
6	Pramu Keamanan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	8		1		1	0
	Kelurahan Baciro						
1	Bendahara	1	D3				

2	Pengelola Monitorig dan Evaluasi	1	D3				
3	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Pengadministrasi Keuangan	2	SLTA/D1 /D2/D3				
5	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
6	Pramu Keamanan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	8		0		0	0
	Kelurahan Terban						
1	Bendahara	1	D3				
2	Pengelola Monitorig dan Evaluasi	1	D3				
3	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1 /D2/D3				
4	Pengadministrasi Keuangan	2	SLTA/D1 /D2/D3	1	SMA	1	
5	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
6	Pramu Keamanan	1	SLTA/D1 /D2/D3				
	Jumlah	8				1	0
C	**Jabatan Fungsional**						
1	*Penggerak Swadaya Masyarakat*	1					
	Jumlah	1		0		0	0
	TOTAL	**106**	**0**	**46**	**0**	**28**	**18**

Sumber data : Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2025

Tabel 2.2 Data PNS yang sudah mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	-
2	Diklatpim IV	17	10	7
3	ADUM	0	-	-
4	SEPADA	0	-	-
5	Struktural yang belum diklat	13	7	6

Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2025

Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki –laki	Perempuan
1	S2	10	6	4
2	D IV/ S1	27	19	7
4	D III	6	5	1
5	SLTA	3	-	3
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	Jumlah	46	20	15

Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2025

Tabel 2.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	10	7	3
4	IV B	21	11	10

Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2025

Jika melihat dari peta jabatan Kemantren/ Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta maka jumlah ideal PNS di Kemantren Gondokusuman adalah sebanyak 107 orang namun baru terisi sebanyak 46 orang atau secara proporsi baru terpenuhi sebesar 41% (Gambar .2).

Gambar 2.2 Diagram Proporsi Pegawai

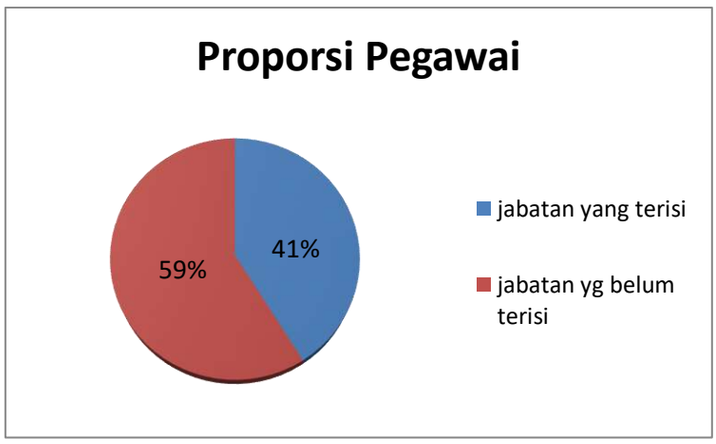

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kemantren Gondokusuman dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan / perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh Kemantren Gondokusuman sebesar Rp. 20.110.464.552,51 yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kemantren Gondokusuman

NO	OBJEK	URAIAN	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	Keterangan
	1,3	**ASET TETAP**	**1688**	**23.448.003.045,57**	
01	**1.3.01**	**TANAH**	**0**	**0,00**	
	1.3.01.01	TANAH	0	0,00	
02	**1.3.02**	**PERALATAN DAN MESIN**	**1417**	**4.132.936.274,67**	
	1.3.02.01	ALAT BESAR	4	26.800.800,36	
	1.3.02.02	ALAT ANGKUTAN	26	690.100.916,86	
	1.3.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	8.600.000,00	
	1.3.02.04	ALAT PERTANIAN	0	0,00	
	1.3.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1113	2.420.939.674,63	
	1.3.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	53	95.184.388,19	
	1.3.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
	1.3.02.08	ALAT LABORATORIUM	4	80.000,00	
	1.3.02.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	
	1.3.02.10	KOMPUTER	115	786.242.852,90	
	1.3.02.11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
	1.3.02.12	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
	1.3.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
	1.3.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
	1.3.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
	1.3.02.16	ALAT PERAGA	0	0,00	
	1.3.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
	1.3.02.18	RAMBU - RAMBU	71	75.837.641,73	
	1.3.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	29	29.150.000,00	
03	**1.3.03**	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**59**	**14.528.243.339,69**	
	1.3.03.01	BANGUNAN GEDUNG	40	14.092.867.388,51	
	1.3.03.02	MONUMEN	3	77.618.866,00	
	1.3.03.03	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
	1.3.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	16	357.757.085,18	
04	**1.3.04**	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	**141**	**4.688.620.740,31**	
	1.3.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	116	4.338.675.056,76	
	1.3.04.02	BANGUNAN AIR	24	323.616.068,65	
	1.3.04.03	INSTALASI	0	0,00	
	1.3.04.04	JARINGAN	1	26.329.614,90	
05	**1.3.05**	**ASET TETAP LAINNYA**	**71**	**98.202.690,90**	
	1.3.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	69	18.202.690,90	
	1.3.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	80.000.000,00	
	1.3.05.03	HEWAN	0	0,00	
	1.3.05.04	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	
	1.3.05.05	TANAMAN	0	0,00	
	1.3.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
	1.3.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
06	**1.3.06**	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0**	**0,00**	
	1.3.06.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0,00	
	1,5	**ASET LAINNYA**	**58**	**64.675.527,34**	

07	**1.5.02**	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	**0**	**0,00**	
	1.5.02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	
08	**1.5.03**	**ASET TIDAK BERWUJUD**	**0**	**0,00**	
	1.5.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
09	**1.5.04**	**ASET LAIN-LAIN**	**58**	**64.675.527,34**	
	1.5.04.01	ASET LAIN-LAIN	58	64.675.527,34	
		JUMLAH ASET	**1746**	**23.512.678.572,91**	

Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Desember 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kemantren Gondokusuman selama kurun waktu 4 tahun periode Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke- (%)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	395	400	405	398,5	399	399	395	400,6	398,8	399	399,4	399,2	100	100,15	98,47	100,13	100,1	100,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	81	81,5	82	82,5	83	83,5	81,44	81,75	82,3	82,52	83,58	83,6	100,54	100,31	100,37	100,02	100,7	100,12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	4700000000	4831000000	4973000000	2728767000	2,729E+09	2,729E+09	4881348500	3831131000	6598194000	2816613506	2765833000		103,86	79,3	132,68	103,22	101,36	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman		300	275	250	225	220		283	261	248	121			94,33	105,09	100,8	146,22	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi				100%	100%	100%				100%	100%					100%	100%	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			A	A	A	A			A	A	A				100%	100%	100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman			A	A	A	A			A	A	A				100%	100%	100%	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Kemantren Gondokusuman yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Penyandingan Program RPJMD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Program RPJMD	**Program Permendagri 90 Tahun 2019**	**Program Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Mesyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Mesyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kemantren Gondokusuman dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada kurun waktu 2025 - 2029 mendatang adalah sebagai berikut:

a. Adanya volume pekerjaan yang semakin bertambah dengan *deadline* waktu yang semakin singkat sedangkan SDM terbatas
b. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kemantren Gondokusuman untuk lebih responsif terhadap dinamika tuntutan masyarakat
d. Perubahan perkembangan kebijakan, sosial, budaya dan teknologi yang sangat cepat terjadi

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondokusuman dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Adanya inovasi dan kreatifitas dari masing-masing unit untuk mengoptimalkan kinerjanya
b. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak Stakeholder
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas;

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta memerlukan sinergitas dari berbagai pihak.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah merupakan cerminan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun tidak jarang kita menemukan berbagai permasalahan yang menghambat pelayanan Perangkat Daerah. Berikut adalah permasalahan umum Kemantren Gondokusuman :

1. Persepsi masyarakat yang memiliki harapan berlebihan dalam layanan, atau belum sepenuhnya memahami batasan kewenangan kemantren yang sudah diatur dalam peraturan.
2. Pelimpahan kewenangan pada Kemantren sering dihadapkan dengan ekspetasi tinggi dari lembaga kemasyarakatan yang melebihi kewenangan kemantren.
3. Banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan online sehingga dibutuhkan pendampingan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kemantren Gondokusuman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota antara lain:

1. Ekspetasi tinggi dari lembaga kemasyarakatan yang melebihi kewenangan kemantren karena kurangnya pendampingan dari Dinas pengampu terhadap lembaga-lembaga turunannya.
2. Belum optimalnya warga masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, walaupun di setiap pertemuan dengan masyarakat sudah dilakukan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan sampah.
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, agar mereka menjadi agen perubahan yang aktif, bukan sekedar penrima manfaat, serta mampu memecahkan masalah dan menetukan nasibnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan. Namun dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat belum optimal, disebabkan pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada stimulus dan berbagai bantuan dari pemerintah tanpa ada upaya untuk mengembangkan potensi diri.

2.2.2. Isu Strategis

Selama kurun waktu 2025 - 2029, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk

itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan Kemantren Gondokusuman yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh isu-isu strategis Kemantren Gondokusuman yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antara Kemantren dan stakeholder terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal serta pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh kemantren untuk memacu partisipasi masyrakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus diupayakan penuntasannya bersama oleh seluruh stakeholder. Selain itu, perlu kebijakan yang melihat penyelesaian kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses ke layanan, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun workshop sehingga bisa meningkatkan kemandirian masyarakat;
3. Penanganan sampah rumah tangga belum optimal. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga masih rendah. Penutupan TPST Piyungan sejak tahun 2023 yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas tempat pengolahan sampah terpadu yang sebanding menyebabkan sampah-sampah tidak diolah dan semakin menumpuk. Permasalahan pengelolaan sampah belum optimal tersebut berpotensi memberikan dampak ikutan yang signifikan, antara lain dalam hal penurunan citra kota sebagai kota wisata serta ancaman terhadap kondisi kesehatan lingkungan.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin dan difabel (Pengarusutamaan Gender).

   Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari

pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Teknis menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Gondokusuman seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kolaborasi setiap pihak tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan inovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya koordinasi stakeholdere dan CSR	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	Pembangunan wilayah atau kebijakan mengikutsertakan masyarakat dengan penuh keterlibatan dan berkelanjutan	Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahap rencana pembangunan dengan kolaborasi lintas stakeholder	Kebijakan, rencana, dan program pembangunan membangun keikutsertaan stakeholder secara konsisten	Peningkatan koordinasi yang terpadu antara Kemantren dan stakeholder (komunitas, kampung, kampus, koorporat dan kemantren) serta Pemanfaatan CSR
Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan pelatihan peningkatan perekonomian kepada UMKM dan warga masyarakat	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	Pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh	Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan strategi pembangunan SDM yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan.

Pemilahan sampah Tingkat rumah tangga sudah dilakukan dan Bank sampah sudah terbentuk di masing-masing RW. Pembuangan sampah sudah melalui penggerobag.	Penanganan sampah belum optimal	Pengelolaan persampahan yang belum optimal	Isu sampah menjadi perhatian utama, khususnya terkait dengan pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan upaya pengurangan sampah dari sumbernya	Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan, strategi mengurangi timbunan sampah, dan meningkatkan penanganan sampah.	Dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak optimal, termasuk volume sampah yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran dalam memilah sampah dari tingkat rumah tangga	Penanganan sampah rumah tangga belum optimal
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan-pelatihan - Sosial, melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	Pembangunan wilayah atau kebijakan melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka diperhatikan dalam setiap tahapan	Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembangunan, serta perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Kebijakan, rencana, dan program pembangunan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi mereka	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan GenderPeningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kemantren. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Yogyakarta, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kemantren Gondokusuman menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kemantren Gondokusuman.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada visi Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 yaitu “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren adalah misi ke-3 (tiga) RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 :

“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”

dan misi ke-4 (empat) RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 :

“Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945”.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut diatas, maka Kemantren Gondokusuman memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren, yaitu “Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondokusuman”. Tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja tujuan Indeks Pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan formula perhitungan: 80 % nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren + 20 %nilai Evaluasi Kinerja Kemantren.

Dalam mencapai tujuan perangkat daerah tersebut, tidak lepas kaitannya dengan sasaran perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kemantren Gondokusuman untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kemantren Gondokusuman menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator sasaran nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan dengan formula perhitungan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Demangan, ditambah Kelurahan Kotabaru, ditambah Kelurahan Klitren, ditambah Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban dibagi 5 serta meningkatnya tatakelola pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaktif dengan indikator sasaran nilai reformasi Birokrasi Kemantren

Gondokusuman dan dengan formula perhitungan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Teknik dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondokusuman		Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman (Poin)	499	499	499.36	499.72	500.08	500.44	500.80	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman (poin)	399	399	399.20	399.40	399.60	399.80	400	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaktif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman (Nilai)	A (89,211)	A (81,00-83,00)	A (81,50-83,50)	A (82,00-84,00)	A (82,50-84,50)	A (83,00-85,00)	A (83,50-85,50)	

3.2. Penahapan Renstra

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra perangkat daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akeslerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Penahapan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029. Implementasi penahapan pembangunan di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tetap memperhatikan prioritas usulan masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang setiap tahun dilaksanakan.

Lokus Pembangunan

Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-

periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam RPJMD 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan lokus Pembangunan Prioritas dalam RPJMD 2025-2029, Kemantren Gondokusuman termasuk dalam lokus Satuan Ruang Strategis Kotabaru dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai.

1. Satuan Ruang Strategis Kotabaru

   Kotabaru adalah kawasan yang dulunya dibangun untuk permukiman bangsa Eropa dilengkapi dengan fasilitas listrik melalui ANIEM, saluran pengairan serta bangunan berarsitektur indis.

   Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Kotabaru sebagai destinasi wisata alternatif, penyangga destinasi pariwisata di Malioboro sehingga sarana dan prasaranya harus memadahi serta dilengkapi dengan SDM yang mendukung ekonomi kreatif.

2. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai

   Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai merupakan salah satu isu dalam upaya pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut melalui pendekatan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

   Penanganan kawasan kumuh akan dilaksanakan melalui kegiatan pemugaran dan peremajaan kawasan dengan menerapkan konsep konsolidasi lahan, yang memungkinkan pengembangan kawasan secara lebih tertata, terintegrasi, dan layak huni. Upaya penataan ini juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

   Implementasi konsep konsolidasi lahan merupakan salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui pendekatan ini, lahan yang semula tidak tertata akan dikelola dan dikembangkan menjadi kawasan yang lebih teratur, fungsional, dan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.

   Dalam upaya penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai melalui pendekatan M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) dan konsolidasi lahan, Kemantren Gondokusuman memiliki peran strategis sebagai fasilitator pembangunan berbasis wilayah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Meskipun kewenangan teknis berada pada Pemerintah Kota, Kemantren berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan peran tersebut perlu dilakukan secara partisipatif, transparan, dan humanis, guna memastikan bahwa transformasi kawasan kumuh tidak menimbulkan beban sosial, melainkan menjadi peluang untuk mewujudkan kota yang inklusif, sehat, dan berkeadilan

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu 2025 - 2029. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman pada tahun 2025 - 2029 mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama kurun waktu 2025 - 2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondokusuman	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah hierarki perencanaan dan penganggaran yang saling terkait untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Penyusunan Program Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      1) Gelar Budaya Jogja
2. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**
   b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Demangan
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kotabaru
      4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Klitren
      5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Terban
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
   c. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Prencanaan perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwilanan/ Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

g. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1) Peningkatan fektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan. Kotabaru, Klitren, baciro dan Terban
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan. Kotabaru, Klitren, baciro dan Terban
4) Evaluasi Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

6. Progam Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1) Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam menjalankan program-program yang ada, akan di didukung juga oleh kegiatan dan subkegiatan yang relevan dengan program tersebut. Untuk daftar program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

TABEL 4.1 CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman							
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondokusuman				Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman (Poin)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman (poin)		
			Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Gondokusuman		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondokusuman)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondokusuman)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondokusuman)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Demangan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Demangan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Demangan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Kotabaru)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Kotabaru)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Kotabaru)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Klitren)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Klitren)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Klitren)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Baciro)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Baciro)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Baciro)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Terban)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Terban)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan kelstimewaan (Kelurahan Terban)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Kelstimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Kelstimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondokusuman		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gondokusuman	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik (Persentase)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (Persentase)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (Dokumen)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Klitren	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Klitren	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Klitren	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Klitren	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Persentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana (Persentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondokusuman		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP (Persentase)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP (Persentase)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Persentase)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan (Persentase)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaktif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman (Nilai)		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman		"Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman " (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondokusuman	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman (Persentase)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman (Persentase)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Gondokusuman	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Gondokusuman	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman (Persentase)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman (Nilai)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Gondokusuman sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah

TABEL 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Gondokusuman	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Baciro)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Demangan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Klitren)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondokusuman)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	40.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN						15.254.997.884		15.565.274.432		15.980.350.056		16.394.242.466		16.958.784.758		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.157.829.572		9.394.919.920		9.586.006.365		9.829.317.042		10.096.533.364		10.444.211.527		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman	Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	9.157.829.572	Terkelola dan Terukur	9.394.919.920	Terkelola dan Terukur	9.586.006.365	Terkelola dan Terukur	9.829.317.042	Terkelola dan Terukur	10.096.533.364	Terkelola dan Terukur	10.444.211.527	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
	Nilai IKM Kemantren Gondokusuman (Nilai)	83,5	83,52		83,52		83,54		83,56		83,6		83,62			
	"Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman " (Predikat)	A	A		A		A		A		A		A			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.882.000		15.828.000		16.080.000		16.488.000		16.928.000		17.510.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.882.000	1	15.828.000	1	16.080.000	1	16.488.000	1	16.928.000	1	17.510.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		5			

Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondokusuman)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	40.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				540.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN						15.254.997.884		15.565.274.432		15.960.350.056		16.394.242.466		16.958.784.758		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.157.829.572		9.394.919.920		9.586.006.365		9.829.317.042		10.096.533.364		10.444.211.527		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman	Nilai SRP Kemantren Gondokusuman (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	9.157.829.572	Terkelola dan Terukur	9.394.919.920	Terkelola dan Terukur	9.586.006.365	Terkelola dan Terukur	9.829.317.042	Terkelola dan Terukur	10.096.533.364	Terkelola dan Terukur	10.444.211.527	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
	Nilai IKM Kemantren Gondokusuman (Nilai)	83,5	83,52		83,52		83,54		83,56		83,6		83,62			
	"Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman " (Predikat)	A	A		A		A		A		A		A			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.862.000		15.828.000		16.080.000		16.483.000		16.928.000		17.510.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.862.000	1	15.828.000	1	16.080.000	1	16.483.000	1	16.928.000	1	17.510.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		5			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	6		6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.624.000		1.380.000		1.410.000		1.446.000		1.485.000		1.536.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.624.000	3	1.380.000	3	1.410.000	3	1.446.000	3	1.485.000	6	1.536.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				242.000		242.000		250.000		255.000		262.000		271.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	242.000	1	242.000	1	250.000	1	255.000	1	262.000	1	271.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				242.000		242.000		250.000		255.000		262.000		271.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	242.000	1	242.000	1	250.000	1	255.000	1	262.000	1	271.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				242.000		242.000		250.000		255.000		262.000		271.000		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	242.000	1	242.000	1	250.000	1	255.000	1	262.000	1	271.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				242.000		242.000		250.000		255.000		262.000		271.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	242.000	1	242.000	1	250.000	1	255.000	1	262.000	1	271.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.050.000		13.020.000		13.200.000		13.535.000		13.900.000		14.378.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	6	10.050.000	6	13.020.000	6	13.200.000	6	13.535.000	6	13.900.000	6	14.378.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				220.000		460.000		470.000		482.000		495.000		512.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	220.000	1	460.000	1	470.000	1	482.000	1	495.000	1	512.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.237.774.000		7.109.292.490		7.253.894.475		7.437.998.703		7.640.239.078		7.903.367.998		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.237.774.000	1	7.109.292.490	1	7.253.894.475	1	7.437.998.703	1	7.640.239.078	1	7.903.367.998		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50		50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.233.858.000		7.102.162.490		7.246.620.475		7.430.539.703		7.632.576.078		7.895.441.998		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50	7.233.858.000	50	7.102.162.490	50	7.246.620.475	50	7.430.539.703	50	7.632.576.078	50	7.895.441.998		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				660.000		920.000		940.000		964.000		990.000		1.024.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	660.000	12	920.000	12	940.000	12	964.000	12	990.000	12	1.024.000		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				396.000		690.000		700.000		718.000		738.000		763.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	396.000	12	690.000	12	700.000	12	718.000	12	738.000	12	763.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				440.000		460.000		470.000		482.000		495.000		512.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	440.000	1	460.000	1	470.000	1	482.000	1	495.000	1	512.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				220.000		460.000		470.000		482.000		495.000		512.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	220.000	1	460.000	1	470.000	1	482.000	1	495.000	1	512.000		

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.980.000		4.140.000		4.224.000		4.331.000		4.450.000		4.603.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.980.000	12	4.140.000	12	4.224.000	12	4.331.000	12	4.450.000	12	4.603.000		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				220.000		460.000		470.000		482.000		495.000		512.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	220.000	1	460.000	1	470.000	1	482.000	1	495.000	1	512.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.070.000		2.070.000		2.100.000		2.160.000		2.220.000		2.298.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.070.000	1	2.070.000	1	2.100.000	1	2.160.000	1	2.220.000	1	2.298.000		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				345.000		345.000		350.000		360.000		370.000		383.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	345.000	1	350.000	1	360.000	1	370.000	1	383.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.150.000		1.150.000		1.180.000		1.210.000		1.250.000		1.293.000		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.180.000		1.210.000	1	1.250.000	1	1.293.000		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.150.000		1.150.000		1.180.000		1.210.000		1.250.000		1.293.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.180.000		1.210.000	1	1.250.000	1	1.293.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.227.372		198.500.436		202.346.300		207.481.000		213.041.000		220.377.700		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		40	198.500.436	40	202.346.300	40	207.481.000	40	213.041.000	40	220.377.700		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	43	39		39		39		39		39		39			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14	5		5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.112.776		8.698.000		8.875.000		9.100.000		9.350.000		9.672.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5	8.112.776	5	8.698.000	5	8.875.000	5	9.100.000	5	9.350.000	5	9.672.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.988.592		65.332.436		66.661.300		68.353.000		70.211.000		72.629.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	43	39	52.988.592	39	65.332.436	39	66.661.300	39	68.353.000	39	70.211.000	39	72.629.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.126.000		11.620.000		11.856.000		12.157.000		12.450.000		12.878.700		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14	5	11.126.000	5	11.620.000	5	11.856.000	5	12.157.000	5	12.450.000	5	12.878.700		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.000.000		78.850.000		80.454.000		82.496.000		84.700.000		87.617.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000	1	78.850.000	1	80.454.000	1	82.496.000	1	84.700.000	1	87.617.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.000.000		34.000.000		34.500.000		35.375.000		36.330.000		37.581.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	94.000.000	40	34.000.000	40	34.500.000	40	35.375.000	40	36.330.000	40	37.581.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				248.130.800		290.769.193		296.667.104		304.196.515		312.467.618		323.229.003		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	14	248.130.800	14	290.769.193	14	296.667.104	14	304.196.515	14	312.467.618	14	323.229.003		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	55		55		57		59		61		63			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				51.600.000		122.466.143		124.940.770		128.111.767		131.595.126		136.127.262		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	55	51.600.000	55	122.466.143	57	124.940.770	59	128.111.767	61	131.595.126	63	136.127.262		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.530.800		168.303.050		171.726.334		176.084.748		180.872.492		187.101.741		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	14	196.530.800	14	168.303.050	14	171.726.334	14	176.084.748	14	180.872.492	14	187.101.741		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.272.384.000		1.346.120.500		1.373.442.000		1.408.236.875		1.446.500.000		1.496.231.500		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.272.384.000	12	1.346.120.500	12	1.373.442.000	12	1.408.236.875	12	1.446.500.000	12	1.496.231.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				238.200.000		263.400.000		268.750.000		275.570.875		283.000.000		292.746.700		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	238.200.000	12	263.400.000	12	268.750.000	12	275.570.875	12	283.000.000	12	292.746.700		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.032.684.000		1.080.220.500		1.102.192.000		1.130.166.000		1.161.000.000		1.200.984.800		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.032.684.000	12	1.080.220.500	12	1.102.192.000	12	1.130.166.000	12	1.161.000.000	12	1.200.984.800		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.231.400		431.189.301		440.296.486		451.550.949		463.887.668		479.904.326		
Meningkatnya kualitas pengelolaan asset Kemantren Gondokusuman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2	431.189.301	2	440.296.486	2	451.550.949	2	463.887.668	2	479.904.326		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20		20			

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	157		157		157		157		157		157			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.074.400		26.535.000		27.075.000		27.762.000		28.500.000		29.481.500		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.074.400	1	26.535.000	1	27.075.000	1	27.762.000	1	28.500.000	1	29.481.500		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.047.000		83.656.500		85.359.000		87.525.400		89.900.000		92.996.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	84.047.000	20	83.656.500	20	85.359.000	20	87.525.400	20	89.900.000	20	92.996.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.510.000		97.700.000		99.687.000		102.217.000		104.970.000		105.585.100		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	157	32.510.000	157	97.700.000	157	99.687.000	157	102.217.000	157	104.970.000	157	105.585.100		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000		223.297.801		228.175.486		234.046.549		240.517.668		251.841.726		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	600.000	2	223.297.801	2	228.175.486	2	234.046.549	2	240.517.668	2	251.841.726		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.285.000		32.941.658		33.777.776		34.696.047		35.890.819		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondokusuman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	116,4	116,60	47.765.000	116,8	32.285.000	116,8	32.941.658	117	33.777.776	117,2	34.696.047	117,2	35.890.819	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				31.445.000		26.465.000		27.003.000		27.688.300		28.400.000		29.378.000		

Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	4	31.445.000	4	26.465.000	4	27.003.000	4	27.688.300	4	28.400.000	4	29.378.000		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				31.445.000		26.465.000		27.003.000		27.688.300		28.400.000		29.378.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	4	31.445.000	4	26.465.000	4	27.003.000	4	27.688.300	4	28.400.000	4	29.378.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				16.320.000		5.820.000		5.938.858		6.089.476		6.296.047		6.512.819		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	16.320.000	12	5.820.000	12	5.938.858	12	6.089.476	12	6.296.047	12	6.512.819		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				16.320.000		5.820.000		5.938.858		6.089.476		6.296.047		6.512.819		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	16.320.000	12	5.820.000	12	5.938.858	12	6.089.476	12	6.296.047	12	6.512.819		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.191.032.768		5.601.576.984		5.715.609.327		5.860.579.588		6.019.903.224		6.227.200.997		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	1.185.799.000	190,6	1.499.211.224	190,8	1.529.705.500	191	1.568.530.000	191,2	1.611.178.200	191,4	1.666.632.000	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.862.254.968		5.364.086.464		5.473.192.947		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	224	224	661.810.000	224	827.011.000	224	843.832.500	224	865.249.000	224	888.775.000	224	919.350.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				661.810.000		827.011.000		843.832.500		865.249.000		888.775.000		919.350.000		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	224	224	661.810.000	224	827.011.000	224	843.832.500	224	865.249.000	224	888.775.000	224	919.350.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	226	248	523.989.000	248	672.200.224	253	685.873.000	259	703.281.000	267	722.403.200	276	747.282.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				523.989.000		672.200.224		685.873.000		703.281.000		722.403.200		747.282.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	226	248	523.989.000	248	672.200.224	253	685.873.000	259	703.281.000	267	722.403.200	276	747.282.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	876.918.168	190,6	954.704.375	190,8	974.124.000	191	998.847.240	191,2	1.026.005.000	191,4	1.061.338.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.862.254.968		5.364.086.464		5.473.192.947		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	174	174	554.083.300	174	563.924.500	174	575.395.000	174	589.998.500	174	606.040.000	174	626.910.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				554.083.300		563.924.500		575.395.000		589.998.500		606.040.000		626.910.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	174	174	554.083.300	174	563.924.500	174	575.395.000	174	589.998.500	174	606.040.000	174	626.910.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	162	52	322.834.868	52	390.779.875	53	398.729.000	54	408.848.740	56	419.965.000	58	434.428.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				322.834.868		390.779.875		398.729.000		408.848.740		419.965.000		434.428.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	162	52	322.834.868	52	390.779.875	53	398.729.000	54	408.848.740	56	419.965.000	58	434.428.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kitren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	1.276.877.000	190,6	1.286.460.000	190,8	1.312.626.600	191	1.345.944.318	191,2	1.382.538.700	191,4	1.430.150.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.862.254.968		5.364.086.464		5.473.192.947		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	277	277	588.322.000	277	792.261.000	277	808.375.600	277	828.894.200	277	851.430.000	277	880.750.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				588.322.000		792.261.000		808.375.600		828.894.200		851.430.000		880.750.000		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	277	277	588.322.000	277	792.261.000	277	808.375.600	277	828.894.200	277	851.430.000	277	880.750.000	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	128	80	688.555.000	80	494.199.000	82	504.251.000	84	517.050.118	86	531.108.700	89	549.400.000	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				688.555.000		494.199.000		504.251.000		517.050.118		531.108.700		549.400.000	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	128	80	688.555.000	80	494.199.000	82	504.251.000	84	517.050.118	86	531.108.700	89	549.400.000	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	676.400.800	190,6	743.686.485	190,8	758.792.647	191	778.051.770	191,2	799.446.324	191,4	826.999.997	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.862.254.988		5.364.086.464		5.473.192.947		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	115	111	371.877.000	111	464.831.965	111	474.286.647	111	486.324.000	111	499.547.000	111	516.750.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				371.877.000		464.831.965		474.286.647		486.324.000		499.547.000		516.750.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	115	111	371.877.000	111	464.831.965	111	474.286.647	111	486.324.000	111	499.547.000	111	516.750.000	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	80	61	304.562.800	61	278.834.500	62	284.506.000	64	291.727.770	66	299.899.324	68	310.249.997	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				304.562.800		278.834.500		284.506.000		291.727.770		299.899.324		310.249.997	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	80	61	304.562.800	61	278.834.500	62	284.506.000	64	291.727.770	66	299.899.324	68	310.249.997	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	846.260.000	190,6	826.669.400	190,8	843.484.000	191	864.892.560	191,2	888.408.000	191,4	919.003.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.862.254.988		5.364.086.464		5.473.192.947		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	184	184	509.915.000	184	475.554.000	184	485.227.000	184	497.542.000	184	511.070.000	184	528.670.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				509.915.000		475.554.000		485.227.000		497.542.000		511.070.000		528.670.000	

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	184	184	509.915.000	184	475.554.000	184	485.227.000	184	497.542.000	184	511.070.000	184	528.670.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	64	80	336.345.000	80	351.115.400	82	358.257.000	84	367.350.560	86	377.338.000	89	390.333.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				336.345.000		351.115.400		358.257.000		367.350.560		377.338.000		390.333.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	64	80	336.345.000	80	351.115.400	82	358.257.000	84	367.350.560	86	377.338.000	89	390.333.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,4	190,60	328.777.800	190,6	290.865.500	190,8	296.776.580	191	304.313.700	191,2	312.327.000	191,4	323.078.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				191.010.000		143.280.000		146.191.380		149.902.000		153.800.000		159.095.000		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	16	191.010.000	16	143.280.000	16	146.191.380	16	149.902.000	16	153.800.000	16	159.095.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				191.010.000		143.280.000		146.191.380		149.902.000		153.800.000		159.095.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	16	191.010.000	16	143.280.000	16	146.191.380	16	149.902.000	16	153.800.000	16	159.095.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						5.364.086.464		5.473.192.847		5.612.108.888		5.764.976.224		5.963.497.997		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	85.950.000	6	53.375.000	6	54.460.200	6	55.843.000	6	57.400.000	6	59.375.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80.430.000		49.235.000		50.236.000		51.511.000		52.900.000		54.721.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	80.430.000	6	49.235.000	6	50.236.000	6	51.511.000	6	52.900.000	6	54.721.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.520.000		4.140.000		4.224.200		4.332.000		4.500.000		4.654.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	5.520.000	1	4.140.000	1	4.224.200	1	4.332.000	1	4.500.000	1	4.654.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				24.685.000		65.239.500		66.586.000		68.258.200		69.998.000		72.408.000		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	17.685.000	1	22.330.000	1	22.784.000	1	23.363.000	1	23.998.000	1	24.824.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				17.685.000		22.330.000		22.784.000		23.363.000		23.998.000		24.824.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	17.685.000	1	22.330.000	1	22.784.000	1	23.363.000	1	23.998.000	1	24.824.000		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	2	7.000.000	2	42.909.500	2	43.782.000	2	44.893.200	2	46.000.000	2	47.584.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.000.000		42.909.500		43.782.000		44.893.200		46.000.000		47.584.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	2	7.000.000	2	42.909.500	2	43.782.000	2	44.893.200	2	46.000.000	2	47.584.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				27.152.800		28.971.000		29.559.000		30.312.500		31.129.000		32.200.000		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	55	55	13.645.200	55	15.705.000	66	16.024.000	66	16.433.000	66	16.879.000	66	17.460.000		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				13.645.200		15.705.000		16.024.000		16.433.000		16.879.000		17.460.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	55	55	13.645.200	55	15.705.000	66	16.024.000	66	16.433.000	66	16.879.000	66	17.460.000		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	36	36	4.785.000	36	4.840.000	36	4.938.000	36	5.064.000	36	5.200.000	36	5.379.000		

7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				4.785.000		4.840.000		4.938.000		5.064.000		5.200.000		5.379.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	36	36	4.785.000	36	4.840.000	36	4.938.000	36	5.064.000	36	5.200.000	36	5.379.000		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	140	140	8.722.600	140	8.426.000	140	8.597.000	140	8.815.500	140	9.050.000	140	9.361.000		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				8.722.600		8.426.000		8.597.000		8.815.500		9.050.000		9.361.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	140	140	8.722.600	140	8.426.000	140	8.597.000	140	8.815.500	140	9.050.000	140	9.361.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				201.304.000		161.650.000		164.937.854		169.124.283		173.722.036		179.704.224		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondokusuman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	146,22	100	201.304.000	100	161.650.000	100	164.937.854	100	169.124.283	100	173.722.036	100	179.704.224	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				201.304.000		161.650.000		164.937.854		169.124.283		173.722.036		179.704.224		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	11	11	201.304.000	11	161.650.000	11	164.937.854	11	169.124.283	11	173.722.036	11	179.704.224		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				201.304.000		161.650.000		164.937.854		169.124.283		173.722.036		179.704.224		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	11	11	201.304.000	11	161.650.000	11	164.937.854	11	169.124.283	11	173.722.036	11	179.704.224		
Meningkatnya operasi ketertiban						0		0		0		0		0		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				57.992.000		64.566.000		65.879.230		67.551.367		69.387.795		71.777.191		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	57.992.000	100	64.566.000	100	65.879.230	100	67.551.367	100	69.387.795	100	71.777.191	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				57.992.000		64.566.000		65.879.230		67.551.367		69.387.795		71.777.191		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	20	20	1.800.000	20	5.450.000	20	5.560.000	20	5.700.000	20	5.845.000	20	6.046.300		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1.800.000		5.450.000		5.560.000		5.700.000		5.845.000		6.046.300		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	20	20	1.800.000	20	5.450.000	20	5.560.000	20	5.700.000	20	5.845.000	20	6.046.300		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	56.192.000	12	59.116.000	12	60.319.230	12	61.851.367	12	63.542.795	12	65.730.891		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				56.192.000		59.116.000		60.319.230		61.851.367		63.542.795		65.730.891		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	56.192.000	12	59.116.000	12	60.319.230	12	61.851.367	12	63.542.795	12	65.730.891		

4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mechanism perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indicator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni
   c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
   c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan

d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Dalam menjalankan program-programnya, Kemantren Gondokusuman juga memberikan dukungan terhadap program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Program tersebut juga dijabarkan sampai detail dalam kegiatan/sub kegiatan. Berikut Program Prioritas yang menjadi dukungan Kemantren Gondokusuman yang tertuang dalam Renstra 2025- 2029 dan dalam RPJMD 2025-2029:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kemudian dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang adaptif.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, kemudian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Demangan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Demangan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kotabaru dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kotabaru, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Klitren dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Klitren, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baciro dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baciro, dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban. Kemudian dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, selanjutnya dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup. Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat dan Program Pemajuan Ekonomi Kreatif.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Jogja Tangguh Bencana.

Tabel 4.3 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondokusuman	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum / Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat / Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa / Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Demangan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan / Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan / Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Klitren	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan / Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Baciro	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan / Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Terban	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan / Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan / Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kemantren Gondokusuman, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kemantren Gondokusuman yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025 – 2029.

Indikator kinerja utama Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.4.01.2.22.03.0000 - Kemantren Gondokusuman									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman	Poin	499	499	499,36	499,72	500,08	500,44	500,8	
3.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	poin	399	399	399,2	399,4	399,6	399,8	400	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Nilai	A (89,211)	A (81,00-83,00)	A (81,50-83,50)	A (82,00-84,00)	A (82,50-84,50)	A (83,00-85,00)	A (83,50-85,50)	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 merupakan acuan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

2. Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kemantren Gondoksuman (Renja Kemantren Gondokusuman) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta.

3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Yogyakarta, keberadaan Renja Kemantren Gondokusuman harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kemantren Gondokusuman (RKA-Kemantren Gondokusuman).

4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renja-Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaan dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) dan sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi Kemantren Gondokusuman.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra Kemantren Gondokusuman tahun 2025 – 2029 dapat menjadi dasar pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban

Meskipun Renstra perangkat daerah sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Kota Yogyakarta.

Dokumen Renstra bukan hanya sekedar formalitas, melainkan komitmen bersama perangkat daerah untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Renstra akan menjadi pedoman Kemantren Gondokusuman dalam mencapai visi misi organisasi lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

POHON KINERJA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pembangunan

INDIKATOR KINERJA:
Indeks pembangunan Kemantren

TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
399	399,20	399,4	399,6	400,00

SASARAN PERANGKAT DAERAH:
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja:
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman

SASARAN PERANGKAT DAERAH:
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaktif

Indikator Kinerja:
Hasil Penilaian Reformasi

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondokusuman

*)1)

Indikator Outcome
Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan umum Kemantren Gondokusuman

Indikator
Persentase standar pelayanan umum yang terkandung baik

Output
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Indikator :
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

*)2)

Indikator Outcome
Meningkatnya Pelayanan Layanan yang Terfasilitasi

Indikator
Persentase pelayan layanan yang terfasilitasi sesuai SOP

Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewilayahan

Indikator :
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Pelayanan pada Urusan Pemerintahan

*)3)

Indikator Outcome
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan

Indikator
Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan

Output
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

Indikator :
Jumlah Potensi dan Dimas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

*)2)

Indikator Outcome
Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan Terlengkapi

Indikator
Persentase sarana prasarana terlengkapi

Output
Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Indikator :
Jumlah sarpras kelurahan yang terlengkapi di kelurahan

*)3)

Indikator Outcome
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator
Jumlah Lembaga yang DiFasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat

Output
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator :
Jumlah Laporan Penyelgaraan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

*)4)

Indikator Outcome
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator
Jumlah Dokumen Rkl/Dmlhdg dan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan

Output
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan

Indikator :
Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan

Output
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan

Indikator :
Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan

*)5)

Indikator Outcome
Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan

Indikator
Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan

Output
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan yang Efektifnggerakkan

Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Efektifnggerakkan

*)6)

Indikator Outcome
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan

Indikator
Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan

Output
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Indikator :
Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Output
Terfasilitasinya peningkatan ketahanan pangan lokasgda

Indikator :
Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Ketahanan Lingkungan Hidup

*)7)

Indikator Outcome
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan

Indikator
Persentasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan

Output
Terlaksananya Pemenuhan Kesadaran Hukumgda dalam Meningkatkan Kualitas Ketahanan Lingkungan Hidup

Indikator :
Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Ketahanan Lingkungan Hidup

*)8)

Indikator Outcome
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana

Indikator
Persentase kelembagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana

Output
Terlaksananya pelatihan kebugaran bencana

Indikator :
Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Pelatihan Kebugaran Tanggap Bencana Alam

*)9)

Meningkatnya Kelestarian dan Ketertiban Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang dilaksanakan

*)10)

Indikator Outcome
Meningkatnya operasi ketertiban

Indikator
Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP

Output
Terlaksananya operasi ketertiban

Indikator :
Jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP

*)11)

Indikator Outcome
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada

Indikator
Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP

Output
Terlaksananya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada

Indikator :
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia

*)12)

Meningkatnya kinerjas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti

*)13)

Indikator Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator
Persentase Pelaksanaan Forkopimcam Tuntas/optimal yang dilaksanakan

Output
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator :
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

*)14)

Indikator Outcome
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Indikator
Persentase hasil fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Output
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Indikator :
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

*)15)

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman
Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman

Indikator Outcome
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondokusuman

Indikator
Persentase Perencanaan, penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman
Persentase ketersediaan data statistik sektoral kemantren Gondokusuman

Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output
Terwujudnya Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Indikator :
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Output
Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator :
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Output
Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator :
Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Output
Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Output
Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

*)16)

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Nilai Pengelolaan Keuangan dan Aset

Indikator Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Gondokusuman

Indikator
Nilai pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman

Output
Terwujudnya Data dan Tunjangan ASN

Indikator :
Jumlah orang yang mewarnai gaji dan Tunjangan ASN

Output
Terlaksananya Perencanaan dan Pengadaan / Pemiliharaan Keuangan SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan / Pemiliharaan Keuangan SKPD

Output
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Output
Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output
Terwujudnya Dokumen Bahan Penggajian Pemberhentian dan Tindak Lanjut

Indikator :
Jumlah Dokumen Bahan Penggajian Pemberhentian dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Output
Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output
Terwujudnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator :
Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

*)17)

Indikator Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman

Indikator
Nilai pengelolaan Aset dan Asset Kemantren Gondokusuman

Output
Terwujudnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di SKPD

Output
Terlaksananya Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah di SKPD

Output
Terwujudnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah di dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Output
Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Rekomendasi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Output
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

Output
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Output
Terwujudnya Modal

Indikator :
Jumlah Unit Motor yang dioperasikan

Output
Terwujudnya Perubatan dan Mesin Lainnya

Indikator :
Jumlah Unit pendaftaran mesin lainnya yang dioperasikan

Output
Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Output
Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan

Indikator :
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Output
Tergantikannya Alat Studio dan Mesin Lainnya

Indikator :
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Digantikan

Output
Tergantikannya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator :
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Digantikan/Direhabilitasi

*)18)

Meningkatnya Kualitas Laporan Kemantren Gondokusuman

Indikator Kinerja :
Nilai WKM Kemantren Gondokusuman

Indikator Outcome
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman

Indikator
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman

Output
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai

Indikator :
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai

*)19)

Indikator Outcome
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman

Indikator
Persiklian pengadaan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman

Output
Terselenggaranya pengelolaan kelabui Lista Pemerintahan Kemantren Gondokusuman

Indikator :
Jumlah jabatan Kompetensi Jabatan Lista Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang Disediakan

Output
Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator :
Jumlah jabatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Output
Terwujudnya Peralatan Rumah Tangga

Indikator :
Jumlah jabatan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Output
Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator :
Jumlah jabatan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Output
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

*)20)

Indikator Outcome
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Gondokusuman

Indikator
Prosentase Barang Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman

Output
Terwujudnya Jasa Surat Menyurat

Indikator :
Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat

Output
Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :
Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Output
Terwujudnya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator :
Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

*)21)

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dindukcapil	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perijinan
3	Kominfo	Dukungan Penyebarluasan Informasi Publik

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Dag	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Bud	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sos	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	DUH	Dukungan penanganan persampahan
8	Dinkes	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DPAPPKB	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
10	DKUKP	Dukungan Sarpras
11	Kes Pelayang	Dukungan penanganan pendidikan

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2.	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3.	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4.	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi
5.	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6.	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7.	Kesbanggol	Dukungan peningkatan wasbang

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RFIMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Keseketariatan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-gisvernment, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

Keterangan:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengampu
*)1)	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
*)2)	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
*)3)	Program : Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	
*)4)	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
*)5)	Program : Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
*a)	Kegiatan: Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Sub Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan Kemakmuran
*b)	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpelayanan	Jawatan Umum
*c)	Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sub Keg: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan
*d)	Kegiatan: Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sub Keg: Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	5 Kelurahan
*e)	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Keg: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Sosial
*f)	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Sub Keg: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Keg: Evaluasi Kelurahan	Jawatan Praja
*g)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Keg: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jawatan Praja
*h)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Keg: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Keg: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sub Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas lelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kemakmuran
*i)	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Keg: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Keamanan
*k)	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jawatan Keamanan
*l)	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penugasan Kepala Daerah Sub Keg: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sub Keg: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Praja Jawatan Keamanan
*m)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub bag KPEP
*n)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
*o)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub bag Umpeg

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Usulan Perubahan Nomenklatur pengampu
1	**Kemantren Gondokusuman**	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondokusuman	Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman	80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman	Nilai SAKIP Kemantren Gondokusuman Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman Nilai IKM Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman Nilai IKM Kemantren Gondokusuman	Sekretariat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondokusuman	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman yang wajib disusun x 100%	Sub. Bag Keu PEP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Bag Keu PEP	
															Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	Sub.Bag Keu PEP	
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman oleh BPKAD	Sub.Bag Keu PEP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN.	Sub.Bag Keu PEP	
																		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub.Bag Keu PEP	
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub.Bag Keu PEP	
																		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub.Bag Keu PEP	
													Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman oleh BPKAD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
													Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Gondokusuman	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian IP ASN Kemantren Gondokusuman oleh BKPSDM	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang terlaksana.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan.	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondokusuman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman oleh BPKAD	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Gondokusuman	Persentase Rencana Pengadaan yang dimasukkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman	Jumlah belanja Kemantren Gondokusuman yang disiapkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Gondokusuman dikali 100%	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	

| | | |

								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%	Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	Jawatan Keamanan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Keamanan	
														Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	Jawatan Praja	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Praja	

2025

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN DANUREJAN

Jl. Hayam Wuruk No.28 RT.030/RW.009
Bausasran Yogyakarta, Kode Pos 55211

+62-274-515789

dn@jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KEMANTREN DANUREJAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kemantren Danurejan telah selesai disusun, yang mana Renstra Perangkat Daerah Kemantren Danurejan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusunlah Renstra Kemantren Danurejan 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dalam menentukan arah, sasaran, strategi dan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di wilayah Kemantren Danurejan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, terencana, terpadu sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, data dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini, sehingga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Danurejan secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 9 September 2025
Mantri Pamong Praja

Bambang Endro Wibowo, S.I.P., M.Si
Pembina Tingkat I/IV b
NIP 197003031990031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

2. Sumber Daya Perangkat Daerah 14

A. Sumber Daya Perangkat Daerah 14

B. Sarana dan Prasarana 15

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

4. Kelompok Sasaran Layanan 22

5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 22

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 23

1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 23

2. Isu Strategis 28

A. Penentuan Isu Permasalahan 28

B. Penentuan Isu Lingkungan 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Jamgka Menengah Kemantren Danurejan 31

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 31

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 32

3.2 Penahapan Renstra Kemantren Danurejan Prioritas Pembangunan Dalam 35
mencapai Tujuan dan Sasaran .....

1. Penahapan Pembangunan Renstra Kemantren Danurejan 35

2. Lokus Renstra Perangkat Daerah 37

3.3 Strategi Perangkat Daerah 38

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 42

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 48

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah 48

1. Uraian Program 48

2. Uraian Kegiatan …… 48
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, taget dan pagu indikatif … 48
4.2 Uraian Sub Kegiatan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah …. 69
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……. 84
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah **……** 88
BAB V PENUTUP …… 89
LAMPIRAN : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra) 90

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan	17
Tabel 2.2.1	Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
Tabel 2.2.1.a	Perubahan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	26
Tabel 2.2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	34
Tabel 3.2	Penahapan Renstra	35
Tabel 3.3	Uraian Strategi Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kemantren Danurejan	40
Tabel 3.4.A	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	48
Tabel 3.4.B	Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kemantren Danurejan	50
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	51
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Kemantren Danurejan	69
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta	85
Tabel 4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (IKU) Perangkat Daerah	88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, dan misi, Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 akan berakhir pada tahun 2029. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2029 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2029 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Renstra PD ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029, Renstra PD merupakan acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Penyusunan Renstra PD juga menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun sehingga pelaksanaan kinerja tahunan menjadi lebih terarah dan terjaga kontinuitasnya.

Dalam penyusunan rencana strategis PD Tahun 2025-2029 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Renstra PD harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Regulasi yang berlaku;

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD); serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 900.1.15.5-3486 Tahun 2024.
8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 900.1.15.5-3486 Tahun 2024
9. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta. Adapun urusan yang diampu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3486 Tahun 2024.

   Maka program di Kemantren Danurejan terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

Rencana Strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dibuat dengan Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang3. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51) tertanggal 15 Agustus 2025.

16. Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dengan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergisitas antara visi, misi, sasaran dan tujuan Kota Yogyakarta dengan Tujuan dan Sasaran Kemantren Danurejan yang dijabarkan dalam Program-Kegiatan.

Tujuan disusunnya Renstra Kemantren Danurejan adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan Kemantren Danurejan, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan Program-kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 . Latar Belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  2. Sumber Daya Perangkat Daerah
     - A. Sumber Daya Perangkat Daerah
     - B. Sarana dan Prasarana
  3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  4. Kelompok Sasaran Layanan
  5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah/ Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2. Isu Strategis
A. Isu Permasalahan
B. Isu Strategis lingkungan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Jangka Menegah Perangkat Daerah Kemantren Danurejan
1. Tujuan Renstra Jangka Menegah Perangkat Daerah
2. Sasaran Renstra Jangka Menegah Perangkat Daerah

3.2 Penahapan Renstra Kemantren Danurejan Prioritas Pembangunan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
1. Penahapan Pembangunan Renstra Kemantren Danurejan
2. Lokus Renstra Perangkat Daerah

3.3 Strategi Perangkat Daerah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1. Program
2. Kegiatan
3. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.2 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui IKU Perangkat Daerah

4.5 Target Kinerjs Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KEMANTREN DANUREJAN

2. GAMBARAN PELAYANAN KEMANTREN DANUREJAN

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Danurejan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenanganKemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;

p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

A. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja, dipimpin oleh Mantri Anom. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
b. pengkoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengkoordinasian program kegiatan jawatan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
g. pengkoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
h. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
i. pengkoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budayapemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaanpada Sekretariat Kemantren;
l. pengkoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
m. pengkoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
o. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
d. pengelolaan aset Kemantren;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
c. penatausahaan keuangan Kemantren;
d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;

i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;

l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang- undangan lainnya;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana

umum di wilayah Kemantren;

l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Danurejan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Kemantren

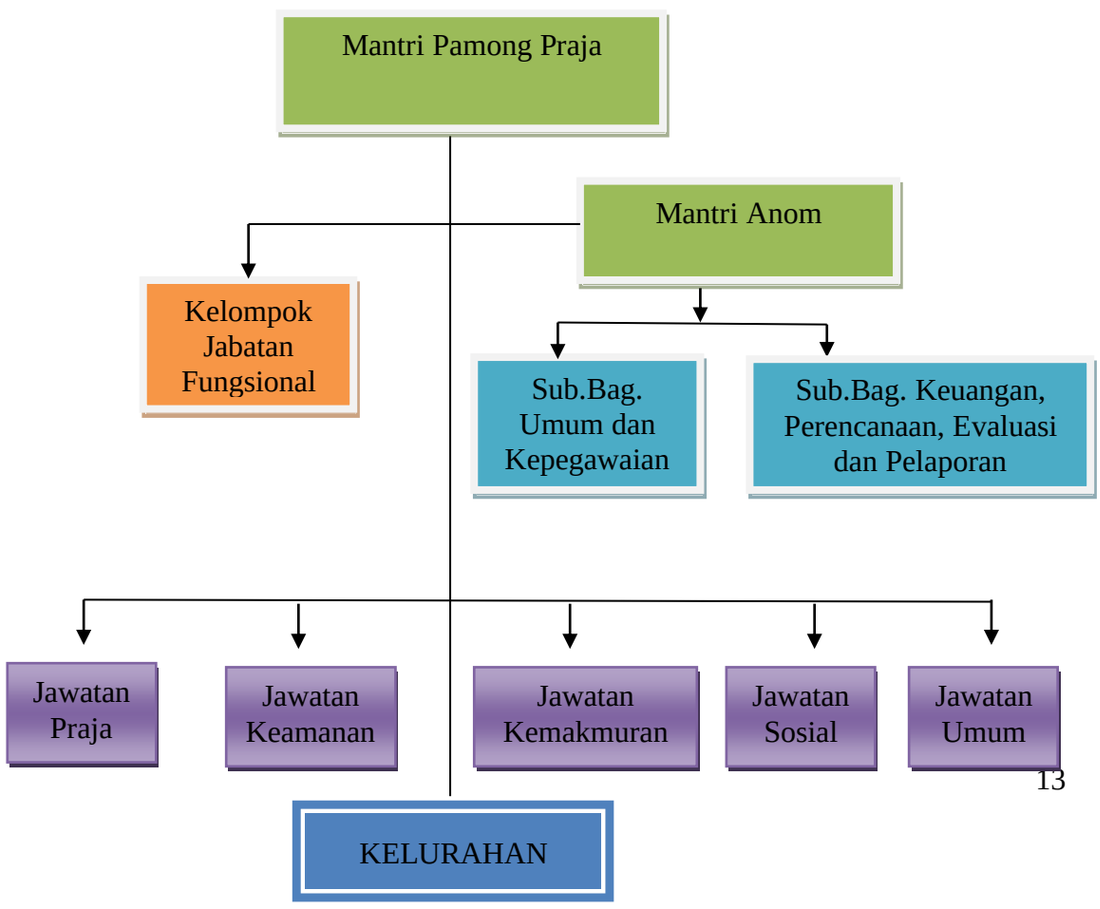

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Danurejan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah danber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
c. Masing-masing Jawatan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada dibawah dan ber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja

2. Sumber Daya Kemantren Danurejan

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya, sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kemantren maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan.Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kemantren, menambah beban tugas. Di Kemantren Danurejan yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 42 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sudah sesuai anjab. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kemantren maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Namun demikian kemampuan/kualitas SDM diharapkan tidak menghambat capaian kinerja yang ditargetkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemantren Danurejan yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan pada awal Tahun 2025 didukung oleh sebanyak 41 orang pegawai, terdiri dari 32 orang pegawai tetap (PNS), 9 orang pegawai tidak tetap (PJLOP), dengan rincian sesuai Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Kualifikasi ASN

Jenis Kelamin Laki-laki pendidikan S2 ada 3 orang, S1 ada 9 orang, SMA/SMK ada 1 orang, dan SMP ada 1 orang. Jenis Kelamin Perempuan pendidikan S2 ada 2 orang, S1 : 11 orang, DIII ada 5 orang, dan SMA/SMK ada 1 orang.

Kualifikasi PJLOP :

Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan SMA/SMK ada 6 orang. Jenis Kelamin Perempuan pendidikan SMA/SMK ada 3 orang .

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren dan Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya penataan ruang pelayanan di Kemantren. Sarana prasaran harus lebih ditingkatkan mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemantren Danurejan adalah sebagai berikut:

Data Sarana Prasarana Kemantren Danurejan dengan kondisi baik sebagai berikut :

1.	Gedung Kantor (Kemantren & Kelurahan)	:	4
2.	Pendopo (Kemantren & Kelurahan)	:	1
3.	Rumah Dinas Camat	:	1
4.	Balai RW	:	7
5.	Kendaraan Dinas Roda 4	:	1
6.	Kendaraan Dinas Roda 3 (Kemantren)	:	2
7.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kemantren & Kelurahan)	:	14
8.	Sound system (Kemantren dan Kelurahan)	:	6
9.	Telepon (Kemantren & Kelurahan)	:	10
10.	Iphone (Ruangan) (Kemantren dan Kelurahan)	:	2
11.	Laptop/Notebook (Kemantren dan Kelurahan)	:	14
12.	Komputer PC (Kemantren dan Kelurahan)	:	38
13.	AC (Kemantren dan Kelurahan)	:	14
14.	Air Purifier (Kemantren dan Kelurahan)	:	5
15.	Buku Perpustakaan (Kemantren & Kelurahan)	:	38
16.	Almari (Kemantren & Kelurahan)	:	41
17.	Meja Komputer (Kemantren & Kelurahan)	:	8
18.	Meja Pelayanan (Kemantren & Kelurahan)	:	5
19.	Kursi Tunggu Pelayanan (Kemantren & Kelurahan)	:	9
20.	Mesin Ketik (Kemantren & Kelurahan)	:	2
21.	Printer (Kemantren & Kelurahan)	:	31
22.	Sepeda (Kemantren & Kelurahan)	:	7
23.	Kamera (Kemantren & Kelurahan)	:	3
24.	Televisi (Kemantren & Kelurahan)	:	4
25.	Pompa Air	:	2
26.	Rak Besi	:	6
27.	Gerobak Tarik	:	1
28.	Kipas angin	:	9
	Jumlah		285

Sumber data : Kemantren Danurejan bulan Juli Tahun 2025

3. Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan

Kemantren Danurejan sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan **Sasaran Strategis** yaitu :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dengan indikator sasaran nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Baseline (2024)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
							Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan Keberdayaan masyarakat **Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta** **Sasaran 2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat**																		
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Suryatmajan ditambah Kel. Tegalpanggung ditambah Kel. Bausasran dibagi 3	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	-	-	402 poin	402 poin	404 poin	408 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Baseline (2024)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
							Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Misi 6 Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (Tata Kelola Pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. **Tujuan 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan** **Sasaran 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan**																		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA Nilai	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	BB nilai	AA nilai	BB nilai	AA nilai	BB nilai	AA nilai

Program PD pada RPJMD 2023 - 2026	Indikator Program PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi sd TW II
Program Peningkatan dan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Danurejan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	80	81,8	82	82,03	82 poin	82,09 poin	82,50 poin	82,68 poin	83 poin	83,45 poin	83,50 poin	83,55 poin
	Angka Swadaya Masyarakat Total	854.865.400 Rupiah	892.609.400 Rupiah	1.037.956.600 Rupiah	1.247.600.000 Rupiah	1.082.975.500 Rupiah	1.344.085.000 rupiah	1.137.124. 275 Rupiah	1.813.250. 000 rupiah	1.193.980.489 rupiah	1.969.600. 000 rupiah	1.253.679.513 rupiah	1.738.349.500 rupiah
	Jumlah Pelanggaran PERDA Kemantren Danurejan	-	40 pelanggaran	50 pelanggaran	41 pelanggaran	50 pelanggaran	40 pelanggaran	48 pelanggaran	27 pelanggaran	47 pelanggaran	12 pelanggaran	46 pelanggaran	-
	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-

	koordinasi												
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	-	-	-	-	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	-

Program PD berdasarkan Kepmendagri No. 50 Tahun 2020	Indikator Program PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi sd TW II
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan							82,50 poin	82,68 poin	83 poin	83,45 poin	83,50 poin	83,55 poin
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan							1.137.124. 275 Rupiah	1.813.250. 000 rupiah	1.193.980. 489 rupiah	1.969.600. 000 rupiah	1.253.679. 513 rupiah	1.738.349. 500 rupiah
Program Koordinasi Ketentramanan dan Ketertiban Umum	Pelanggaran Perda							49 pelanggaran	40 pelanggaran	48 pelanggaran	27 pelanggaran	47 pelanggaran	12 pelanggaran
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat					A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Danurejan pada awal Tahun Renstra 2023 memiliki 5 Program Kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan, Program Koordinasi Ketentramanan dan Ketertiban Umum dengan indikator Pelanggaran Perda, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat.

Berdasarakan table penyandingan diatas disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Danurejan dengan warga masyarakatnya saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Suryatmajan, Tegalpanggung, Bausasran.

4. Kelompok Sasaran Layanan

Kemantren Danurejan melaksanakan pelayanan dengan kelompok sasaran layanan sebagai berikut : warga masyarakat Kemantren Danurejan, Lembaga, UMKM, LPMK, RT, RW, PKK, Kampung.

5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dari Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan mengacu pada Instansi atau Organisasi yang bekerja sama dengan Kemantren Danurejan dalam melaksanakan berbagai program danpelayanan publik. Kemantren Danurejan sebagai bagian dari Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Mitra perangkat daerah dari Kemantren Danurejan bisa mencakup berbagai Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan potensi dalam mendukung program-program Kemantren Danurejan. Bappeda dan BPKAD dalam perencanaan anggaran dan evaluasi serta pelaporan keuangan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan. Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren Danurejan. Satpol PP terkait dengan operasi ketertiban dalam menanggulangi pelanggaran perda. Dinas Kominfosan terkait CCTV.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEMANTREN DANUREJAN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Danurejan

Perangkat Daerah Kemantren Danurejan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2020. Sedangkan kedudukan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan dijabarkan lebih konkrit dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Sebagai Perangkat Daerah,

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Identifikasi permasalahan di Kemantren Danurejan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
1. Jawatan Keamanan	1.Masih banyak pelanggaran Perda perijinan reklame 2. Pelanggaran Perda KTR Kawasan Tidak Merokok. 3. Pelanggaran Perda PKL, 4.Pelanggaran Perda Pengelolaan Air Limbah Domistik. 5.Pelanggaran Perda Pondokan 6.Pelanggaran Perda Tribumtranmas	1.Perda Perijinan Reklame 2.Perda KTR Kawasan Tidak Merokok 3.Perda PKL, 4. Perda Pengelolaan Air Limbah Domistik 5. Perda Pondokan, 6. Perda Tribumtranmas No. 7 Tahun 2024.	-	1. Kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. Masih ada pelaku pelanggaran peraturan perijinan dan kriminalitas 3. Kurangnya kesadaran untuk tidak berjualan di daerah yang dilarang.	-

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
2.Jawatan Umum	1.Standar sarpras pelayanan publik sudah memenuhi 2. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Kemantren dan Kelurahan sudah representatif.	1.Peraturan Tentang pelayanan publik, SOP, SPP. 2. UU keterbukaan informasi publik	1. Adanya aduan warga yang membangun rumah tanpa persetujuan tetangga di Cokrodirjan DN I/687 B	1. Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi 2. Adanya anak stunting.	1 Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
3.Jawatan Sosial	1.Masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan baik	Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	1.Banyaknya agenda kegiatan dari Dinas yang Bersamaan dengan kegiatan internal 2. Banyaknya agenda kegiatan pemberdayaan masyarakat diluar jam kerja	1. Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat tinggi 2. Kurangnya partisipasi OPD teknis dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah 3.Tidak mudah regenerasi Kader di wilayah.	1. Kurangnya partisipasi OPD teknis dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah 2. keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat
4.Jawatan Kemakmuran	Partisipasi UMKM dalam pemberdayaan kurang belum maksimal.	perwal pelimpahan kewenangan,	-	Kurangnya pelatihan untuk UMKM dan pemasaran	-
5.Jawatan Praja	1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Koordinasi Forkompimtren berjalan dengan baik.	Perwal pelimpahan kewenangan	-	1.Kurangnya pemahaman terhadap aturan anggaran sehingga masyarakat sering salah faham 2. adanya wilayah rawan konfik	1.Warga masyarakat kurang memahami system penganggaran 2. Adanya wilayah rawan konfik

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
6.Sekretariat	Akuntabilitas Kemantren Danurejan bagus, Nilai SAKIP bagus 88,12, Nilai Reformasi Birokrasi 90,01	Perwal Reformasi No 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level PD	1.Laporan P3DN mengambil data dari LKPP Bigbox 2. Belanja langsung yang tidak melalui e-katalog untuk dientri di SPSE	Koordinasi dengan BPKAD, Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat	Tidak ada hambatan

Permasalahan pelayanan masyarakat di Kemantren Danurejan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Adanya pengaduan yang bukan merupakan kewenangan atau ketugasan dari kemantren
3. Tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.
4. Adanya aspirasi masyarakat melalui LPMK dalam usulan rencana pembangunan di wilayah Kelurahan yang mendukung branding wilayah aspirasinya belum semua terakomodir.
5. Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

1. Kewenangan Mantri Pamong Praja dan jajaran dibawahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik

a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
b. Melaksanakan pendampingan terhadap pelayanan perizinan berusaha melalui OSS.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren.

Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Danurejan :

Tabel 2.2.1a Perubahan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No.	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1	2	3	4
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Pendampingan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2. Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan Melalui OSS 3. Dispensasi Nikah 4. Surat Keterangan Waris 5. Surat Pernyataan Beda Nama 6. Rekomendasi Pelayanan Belum Memiliki Rumah/Tempat Tinggal 7. Rekomendasi Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Maksud dan Tujuan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk melibatkan kelompok **pengarusutamaan gender** dimana masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara

tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable.

3. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi Pengasurutamaan Gender diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Danurejan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang

menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya

2. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Penentuan Isu Permasalahan

Isu Strategis yang dihadapi Kemantren Danurejan tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya rekomendasi pondokan yang menjadi kewenangan Kemantren, kasus Stunting, penanganan sampah, gangguan kebencanaan dan Kamtibmas, pembangunan wilayah terkait hibah, pengarusutamaan gender.

B. Penentuan Isu Lingkungan

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah, sesuai atau berdasarkan isu Global, isu Nasional dan isu Regional pada tabel 2.2.2.

TABEL 2.2.2
TEKNIS MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah		
			Global	Nasional	Regional
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat. 2. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 4.Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan 5.Keterbukaan Informasi Publik	* Rekomendasi pondokan yang menjadi kewenangan Kemantren * Anak Stunting, * Penanganan sampah, * Gangguan kebencanaan dan Kamtibmas, * Pembangunan wilayah terkait hibah, * Pengarusutamaan gender	1. Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi 2. Pengelolaan Persampahan Yang Belum Optimal 3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik 5. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi 6. Penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban	1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota 2. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 3. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global 4. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan	1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan 2. Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan 3. Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana 4. Penguatan Daya Saing Pariwisata	1. Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya 2. Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah		
			Global	Nasional	Regional
1	2	3	4	5	6
			Ketimpangan yang Meningkat	Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional 5. Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasionan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEMANTREN DANUREJAN

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Danurejan Tahun 2025-2029

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Danurejan yang merupakan dokumen perencanaan OPD Kemantren Danurejan 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi OPD sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Danurejan memiliki tujuan sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan"

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan diukur dengan indikator kinerja **Indeks Pembangunan Kemantren Danurejan.**

Pada awal Renstra Tahun 2025 nilai indikator tujuan adalah 526,15 poin sedangkan target tujuan pada akhir Renstra Tahun 2029 adalah 526,27poin.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indeks pembangunan Kemantren dengan formula sebagai berikut :
   80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja Kemantren.
   Dengan sumber data :
   1.1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan = Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
   1.2 Jumlah Nilai evaluasi kinerja Kemantren Danurejan

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk :
   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

c. Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) adalah proses sistematis untuk menilai kinerja seorang Mantri Pamong Praja dan seluruh perangkat Kemantren dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren di Pemerintah Kota Yogyakarta. EKK bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. EKK dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren, serta untuk meningkatkan kinerja Mantri Pamong Praja dan perangkatnya. EKK melibatkan tim evaluasi yang melakukan penilaian secara sistematis terhadap kinerja Kemantren berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan. EKK mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Kemantren. Hasil EKK dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, memberikan penghargaan kepada Kemantren yang berprestasi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan

2. Sasaran Kebijakan Renstra Jangka Menengah Kemantren Danurejan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Danurejan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan

Tahun 2025 sampai dengan 2029 Kemantren Danurejan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan

   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dengan Formula Perhitungan sebagai berikut :

   Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

   Dengan Sumber data sebagai berikut :

   Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Suryatmajan

   Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bausasran

   Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tegalpangung Sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan target pada awal Renstra adalah 409,67 poin dan target pada akhir Renstra adalah 409,71 poin

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan Dengan Formula sebagai berikut :

   Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

   Sasaran Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang Baik dan Adaptif target pada awal Renstra A (83,5 – 86,5) nilai dan target pada akhir Renstra adalah A (85,5 – 88,5) nilai

Teknik dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KEMANTREN DANUREJAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan											
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan		Indeks pembangunan Kemantren Danurejan (Poin)	526,13 poin	526,15 poin	526,19 poin	526,21 poin	526,24 poin	526,27 poin	526,29 poin	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan (Poin)	409,67 poin	409,67 poin	409,68 poin	409,69 poin	409,70 poin	409,71 poin	409,72 poin	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Danurejan (Nilai)	AA (90,01)	A (83,5-86,5)	A (84-87)	A (84,5-87,5)	A (85-88)	A (85,5-88,5)	A (86-89)	

3.2. Penahapan Renstra Kemantren Danurejan Prioritas Pembangunan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

1. Penahapan Pembangunan Renstra Kemantren Danurejan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Danurejan

Tahap I 2026	Tahap II *2027*	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua halyang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untukmemastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan.

Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan public yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi.

Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhirtahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama.

Pelaksanaan dan capaian pembangunan telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan sesuai target dan dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan.

Upaya akselerasi ini merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko belum tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yangmerupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah efisien dan juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap keempat ini menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".** Tahap ini juga

menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju **“Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".**

2. Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode 2025–2029, Kemantren Danurejan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan di wilayah pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Danurejan pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu Membangunan “Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Kraton menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Danurejan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Danurejan . Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Danurejan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Visi Kota Yogyakarta adalah Terwujudnya Kota Yogyakarta yang unggul, maju, dan berkelanjutan dengan berlandaskan kebudayaan dan nilai-nilai keistimewaan.

Misi Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang

baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Tabel 3.3 Uraian Strategi Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kemantren Danurejan

Visi	:	Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi 3	:	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
Sasaran Kota 5	:	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan	Indeks pembangunan Kemantren Danurejan	1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan	1. Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat 2. Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan 3. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Danurejan

Visi	:	Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi 4	:	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
Sasaran Kota 7	:	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan	Indeks pembangunan Kemantren Danurejan	2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Danurejan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Danurejan

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN DANUREJAN

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Danurejan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Danurejan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Danurejan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Danurejan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah.

Strategi juga merupakan cara/lembaga demi lembaga yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategis.

TABEL 3.4.A TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran Renstra OPD : 1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren Danurejan	a. Meningkatnya Layanan Publik di Kemantren Danurejan b. Persentase Pengguna Layanan yang terfasilitasi c. Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang terbangun Kemantren Danurejan d. Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat Kemantren Danurejan b. Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pengguna Layanan c. Melaksanakan Pelayanan yang dilimpahkan sesuai dengan Ketentuan. d. Meningkatkan Integrasi Perencanaan Kewilayahan dengan Instansi Pengampu Tingkat Kota	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	a. Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat b. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan c. Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun d. Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan e. Meningkatnya persentase peran Lembaga Ekonomi kemasyarakatan dalam pembangunan dengan memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam, dengan meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi di wilayah (Forum UMKM, Gapoktan) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	

			Lingkungan Hidup f. Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban Kemantren	a. Meningkatnya operasi ketertiban b. Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda	
		Meningkatkan sinergitas Stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat Kemantren	a. Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan b. Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren c. Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif	a. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan b. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala c. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala d. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala e. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala f. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala g. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	

			h. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	

Tabel. 3.4.B. Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kemantren Danurejan

Visi	:	Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi 3	:	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Keadilan Sosial Melalui Pembangunan Yang Inklusif, Kreatif Dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
Sasaran Kota 5	:	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren	a.Meningkatnya Layanan Publik di Kemantren Danurejan b.Persentase Pengguna Layanan yang terfasilitasi c.Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang terbangun Kemantren Danu d.Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat Kemantren Danurejan e.Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pengguna Layanan f.Melaksanakan Pelayanan yang dilimpahkan sesuai dengan Ketentuan. g.Meningkatkan Integrasi Perencanaan Kewilayahan dengan Instansi Pengampu Tingkat Kota
Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	a. Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat b. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan c. Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun d. Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan e. Meningkatnya persentase peran Lembaga Ekonomi kemasyarakatan dalam pembangunan dengan memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam, dengan meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi di wilayah (Forum UMKM, Gapoktan) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup f. Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan
Meningkatkan ketenteraman dan	a. Meningkatnya operasi ketertiban b. Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda

ketertiban Kemantren		
Meningkatkan sinergitas Stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat Kemantren		a. Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan b. Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren c. Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Visi	:	Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi 4	:	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
Sasaran Kota 7	:	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif		a. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan b. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala c. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala d. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala e. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala f. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala g. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala h. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KEMANTREN DANUREJAN

Program yang ditetapkan dalam rencana strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta meliputi 5 Program sebagai berikut :

KEMANTREN DANUREJAN

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Gelar Budaya Jogja

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Suryatmajan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Tegalpanggung

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Bausasran

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   1.1. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan Sarana dan prasarana Pelayanan Umum.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
   2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Pemberdayaan Kelurahan
   1.1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
   1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta hibah
   1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   1.4. Evaluasi Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya Kecamatan
   2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Kecamatan dan

Kelurahan

3.1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

3.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3.3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

3.4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3.5. Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1. Fasilitasi/Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi/Konsultasi/ Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)

1.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.6 Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.3 Pelaksanaan dan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.4 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi

2.5 Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

2.8 Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1. Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Gedung
   4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4.4 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   5.1 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6.1 Jasa Surat Menyurat
   6.2 Penyediaan Jasa komunikasi /Sumber Daya Air dan Listrik
   6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan.
   7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan/output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyelenggaraan bidang urusan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

CASCADING TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(0
7.01.4.01.2.22.04.0000 – Kemantren Danurejan							
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
						Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
						Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
						Gelar Budaya Jogja	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
						Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Suryatmajan)	

						Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Tegalpanggung)	
						Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Bausasran)	
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan				Indeks pembangunan Kemantren Danurejan		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan		
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 – Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 – Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 – Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 – Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 – Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 – Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 – Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 – Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Peran Lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 – Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 – Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 – Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 – Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 – Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 – Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 – Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 – Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Danurejan		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	

				Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Danurejan		

			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Danurejan		Nilai SAKIP Kemantren Danurejan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Danurejan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Danurejan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Danurejan		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Danurejan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF SEBAGAI BERIKUT:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KEMANTREN DANUREJAN

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Danurejan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Bausasran)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Bausasran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penerapan dan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Suryatmajan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Urusan Kelembagaan dan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Tegalpanggung)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Urusan Kelembagaan dan Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan Kemantren Danurejan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	40.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan PendampinganKeistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN						9.799.441.305		9.997.922.262		10.251.317.642		10.029.178.770		10.891.208.475		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.758.037.875		6.895.496.366		7.070.504.061		7.262.751.070		7.512.880.216		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Danurejan	Nilai SAKIP Kemantren Danurejan (Nilai)	A	A		A	6.758.037.875	A	6.895.496.366	A	7.070.504.061	A	7.262.751.070	A	7.512.880.216	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
	Nilai SPIP Kemantren Danurejan (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai IKM Kemantren Danurejan (Nilai)	83,45	83.5		84		84,5		85		85,5		86			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.915.000		5.650.000		5.764.923		5.911.235		6.071.962		6.281.079		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Danurejan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.915.000	1	5.650.000	1	5.764.923	1	5.911.235	1	6.071.962	1	6.281.079		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
Perencanaan Perangkat Daerah				3,220,000		1.580.000		1.612.137		1.653.053		1.698.000		1.756.479		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3,220,000	3	1.580.000	3	1.612.137	3	1.653.053	3	1.698.000	5	1.756.479		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				575,000		275.000		280.594		287.715		295.538		305.716		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	575,000	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.538	1	305.716		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				575,000		275.000		280.594		287.715		295.538		305.716		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	575,000	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.538	1	305.716		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				575,000		275.000		280.594		287.715		295.538		305.716		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	575,000	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.538	1	305.716		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				575,000		275.000		280.594		287.715		295.538		305.716		
Tersedianya Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	575,000	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.538	1	305.716		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD				4,820,000		2.420.000		2.469.223		2.531.892		2.600.734		2.690.303		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	4,820,000	12	2.420.000	12	2.469.223	12	2.531.892	12	2.600.734	12	2.690.303		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				575,000		550.000		561.187		575.430		591.076		611.433		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	575,000	3	550.000	3	561.187	3	575.430	3	591.076	3	611.433		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.292.569.000		4.985.922.571		5.087.336.236		5.216.452.829		5.358.288.183		5.542.827.628		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5,292,569,000	1	4.985.922.571	1	5.087.336.236	1	5.216.452.829	1	5.358.288.183	1	5.542.827.628		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33		33		33		33		33		33			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,280,674,000.000		4.979.352.571		5.080.632.602		5.209.579.058		5.351.227.512		5.535.523.788		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33	5,280,674,000.000	33	4.979.352.571	33	5.080.632.602	33	5.209.579.058	33	5.351.227.512	33	5.535.523.788		
7.01.01.2.02.0002 – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3,680,000.000		1.760.000		1.795.798		1.841.376		1.891.443		1.956.584		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	3,680,000.000	12	1.760.000	12	1.795.798	12	1.841.376	12	1.891.443	12	1.956.584		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2,300,000.000		1.035.000		1.056.052		1.082.854		1.112.297		1.150.605		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2,300,000.000	12	1.035.000	12	1.056.052	12	1.082.854	12	1.112.297	12	1.150.605		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1,380,000.000		690.000		704.035		721.903		741.532		767.070		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1,380,000.000	12	690.000	12	704.035	12	721.903	12	741.532	12	767.070		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				575,000.000		275.000		280.594		287.715		295.538		305.716		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	575,000.000	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.538	1	305.716		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				165,000.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	165,000.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penvusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3,450,000.000		2.300.000		2.346.782		2.406.343		2.471.772		2.556.900		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	3,450,000.000	12	2.300.000	12	2.346.782	12	2.406.343	12	2.471.772	12	2.556.900		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				345,000.000		345.000		352.017		360.951		370.766		383.535		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	345,000.000	1	345.000	1	352.017	1	360.951	1	370.766	1	383.535		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1,035,000.000		495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1,035,000.000	12	495.000	12	505.068	12	517.887	12	531.968	12	550.289		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,035,000.000		495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1,035,000.000	12	495.000	12	505.068	12	517.887	12	531.968	12	550.289		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Danurejan				0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				223,875,910		170.973.860		174.451.468		178.879.046		183.742.768		190.070.869		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	223,875,910	12	170.973.860	12	174.451.468	12	178.879.046	12	183.742.768	12	190.070.869		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5,003,250		11.934.000		12.176.738		12.485.783		12.825.272		13.266.974		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5,003,250	12	11.934.000	12	12.176.738	12	12.485.783	12	12.825.272	12	13.266.974		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79,778,910		95.886.110		97.836.433		100.319.522		103.047.210		106.596.156		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	79,778,910	12	95.886.110	12	97.836.433	12	100.319.522	12	103.047.210	12	106.596.156		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21,238,750		21.638.750		22.078.882		22.639.244		23.254.805		24.055.701		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	21,238,750	12	21.638.750	12	22.078.882	12	22.639.244	12	23.254.805	12	24.055.701		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117,855,000		41.515.000		42.359.415		43.434.497		44.615.481		46.152.038		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	117,855,000	12	41.515.000	12	42.359.415	12	43.434.497	12	44.615.481	12	46.152.038		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah				263,273,600		173.870.802		177.407.334		181.909.932		186.856.064		193.291.387		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Danurejan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	18	263,273,600	18	173.870.802	18	177.407.334	18	181.909.932	18	186.856.064	18	193.291.387		
	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan(Unit)	99	99		99		99		99		99		99			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				67,750,000		62.564.000		63.836.552		65.456.723		67.236.492		69.552.117		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	99	99	67,750,000	99	62.564.000	99	63.836.552	99	65.456.723	99	67.236.492	99	69.552.117		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				195,523,600		111.306.802		113.570.782		116.453.209		119.619.572		123.739.270		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	18	195,523,600	18	111.306.802	18	113.570.782	18	116.453.209	18	119.619.572	18	123.739.270		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,070,904,885		1.121.908.042		1.144.727.651		1.173.780.839		1.205.695.940		1.247.220.109		
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1,070,904,885	12	1.121.908.042	12	1.144.727.651	12	1.173.780.839	12	1.205.695.940	12	1.247.220.109		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,200,000		3.200.000		3.265.088		3.347.956		3.438.987		3.557.426		
Terlaksananya PenyediaanJasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3,200,000	12	3.200.000	12	3.265.088	12	3.347.956	12	3.438.987	12	3.557.426		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126,962,885		138.016.042		140.823.288		144.397.383		148.323.548		153.431.811		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	126,962,885	12	138.016.042	12	140.823.288	12	144.397.383	12	148.323.548	12	153.431.811		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				940,742,000		980.692.000		1.000.639.275		1.026.035.500		1.053.933.405		1.090.230.872		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	940,742,000	12	980.692.000	12	1.000.639.275	12	1.026.035.500	12	1.053.933.405	12	1.090.230.872		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343,087,600		299.217.600		305.303.686		313.052.293		321.564.185		332.638.855		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Danurejan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	343,087,600	20	299.217.600	20	305.303.686	20	313.052.293	20	321.564.185	20	332.638.855		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	65		65		65		65		65		65			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15		15		15		15		15		15			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26,740,000		26.740.000		27.283.892		27.976.357		28.737.034		29.726.737		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26,740,000	1	26.740.000	1	27.283.892	1	27.976.357	1	28.737.034	1	29.726.737		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,391,500		50.591.500		51.620.531		52.930.660		54.369.845		56.242.342		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	50,391,500	20	50.591.500	20	51.620.531	20	52.930.660	20	54.369.845	20	56.242.342		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				30,436,100		30.436.100		31.055.170		31.843.350		32.709.171		33.835.675		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	65	30,436,100	65	30.436.100	65	31.055.170	65	31.843.350	65	32.709.171	65	33.835.675		
7.01.01.2.09.0009-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				235,520,000		191.450.000		195.344.093		200.301.926		205.748.135		212.834.101		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	235,520,000	15	191.450.000	15	195.344.093	15	200.301.926	15	205.748.135	15	212.834.101		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45,795,500		35.217.500		35.494.145		36.286.039		36.672.949		38.351.064		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	117,67	117,67	45,795,500	117,68	35.217.500	117,69	35.494.145	117,7	36.286.039	117,71	36.672.949	117,72	38.351.064	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				9,980,000		10.184.000		10.391.143		10.654.870		10.944.576		11.321.507		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	9,980,000	1	10.184.000	1	10.391.143	1	10.654.870	1	10.944.576	1	11.321.507		
7.01.02.2.03.0001 -Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				9,980,000		10.184.000		10.391.143		10.654.870		10.944.576		11.321.507		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	9,980,000	1	10.184.000	1	10.391.143	1	10.654.870	1	10.944.576	1	11.321.507		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35,815,500		25.033.500		25.103.002		25.631.169		25.728.373		27.029.557		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	35,815,500	12	25.033.500	12	25.103.002	12	25.631.169	12	25.728.373	12	27.029.557		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				6,045,000		3.417.000		3.486.502		3.574.989		3.672.193		3.798.663		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	6,045,000	12	3.417.000	12	3.486.502	12	3.574.989	12	3.672.193	12	3.798.663		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				29,770,500		21.616.500		21.616.500		22.056.180		22.056.180		23.230.894		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	29,770,500	12	21.616.500	12	21.616.500	12	22.056.180	12	22.056.180	12	23.230.894		
7.01.03 – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,250,496,430		2.922.864.930		2.982.316.002		3.058.007.183		2.641.154.396		3.249.271.676		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	198	198	348,932,680	198	368.917.655	198	376.421.439	198	385.975.016	198	396.469.675	198	410.124.093	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				0		0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,901,563,750		2.628.594.930		2.682.060.551		2.750.131.248		2.324.907.316		2.922.133.044		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	82,977,680	1	74.647.655	1	76.165.988	1	78.099.081	1	80.222.595	1	82.985.461		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				74,232,180		65.902.155		67.242.605		68.949.222		70.823.951		73.263.128		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	74,232,180	10	65.902.155	10	67.242.605	10	68.949.222	10	70.823.951	10	73.263.128		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				8,745,500		8.745.500		8.923.383		9.149.859		9.398.644		9.722.333		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	8,745,500	1	8.745.500	1	8.923.383	1	9.149.859	1	9.398.644	1	9.722.333		
7.01.03.2.03 – Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				66,340,000		97.592.000		99.577.021		102.104.286		104.880.501		108.492.586		
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	66,340,000	4	73.150.000	4	74.637.871	4	76.532.180	4	78.613.090	4	81.320.525		
7.01.03.2.03.0004 – Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				66,340,000		73.150.000		74.637.871		76.532.180		78.613.090		81.320.525		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	66,340,000	4	73.150.000	4	74.637.871	4	76.532.180	4	78.613.090	4	81.320.525		
Meningkatnya Peran Lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215	0	215	24.442.000	215	24.939.150	215	25.572.106	215	26.267.411	215	27.172.061		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan LembagaKemasyarakatan				0		24.442.000		24.939.150		25.572.106		26.267.411		27.172.061		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215	0	215	24.442.000	215	24.939.150	215	25.572.106	215	26.267.411	215	27.172.061		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat dan Kelurahan				195,800,000		196.678.000		200.678.430		205.771.649		211.366.579		218.646.046		
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	45	45	17,755,000	45	12.198.000	45	12.446.107	45	12.761.990	45	13.108.988	45	13.560.462		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	29	29		29		29		29		29		29			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				3,450,000		4.998.000		5.099.659		5.229.089		5.371.268		5.556.254		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	29	29	3,450,000	29	4.998.000	29	5.099.659	29	5.229.089	29	5.371.268	29	5.556.254		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				14,305,000		7.200.000		7.346.448		7.532.901		7.737.720		8.004.208		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	45	45	14,305,000	45	7.200.000	45	7.346.448	45	7.532.901	45	7.737.720	45	8.004.208		
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	30	3,585,000	30	7.200.000	30	7.346.448	30	7.532.901	30	7.737.720	30	8.004.208		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3,585,000		7.200.000		7.346.448		7.532.901		7.737.720		8.004.208		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	30	3,585,000	30	7.200.000	30	7.346.448	30	7.532.901	30	7.737.720	30	8.004.208		
Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	10	10	174,460,000	10	177.280.000	10	180.885.875	10	185.476.758	10	190.519.871	10	197.081.376		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	10	10		10		10		10		10		10			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				114,130,000		125.185.000		127.731.263		130.973.082		134.534.240		139.167.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	10	10	114,130,000	10	125.185.000	10	127.731.263	10	130.973.082	10	134.534.240	10	139.167.600		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60,330,000		52.095.000		53.154.612		54.503.676		55.985.631		57.913.776		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	10	10	60,330,000	10	52.095.000	10	53.154.612	10	54.503.676	10	55.985.631	10	57.913.776		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Bausasran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	198	198	815,927,140	198	681.846.000	198	695.714.748	198	713.371.988	198	732.768.572	198	758.005.122		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,901,563,750		2.628.594.930		2.682.060.551		2.750.131.248		2.324.907.316		2.922.133.044		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	219	219	463,180,600	219	498.606.000	219	508.747.646	219	521.659.661	219	535.843.587	219	554.298.041		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				463,180,600		498.606.000		508.747.646		521.659.661		535.843.587		554.298.041		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	219	219	463,180,600	219	498.606.000	219	508.747.646	219	521.659.661	219	535.843.587	219	554.298.041		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	225	225	352,746,540	225	183.240.000	225	186.967.102	225	191.712.327	225	196.924.985	225	203.707.081		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				352,746,540		183.240.000		186.967.102		191.712.327		196.924.985		203.707.081		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	225	225	352,746,540	225	183.240.000	225	186.967.102	225	191.712.327	225	196.924.985	225	203.707.081		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	198	198	870,479,100	198	927.886.675	198	946.759.890	198	970.788.656	198	997.184.399	198	1.031.463.350		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,901,563,750		2.628.594.930		2.682.060.551		2.750.131.248		2.324.907.316		2.922.133.044		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	159	159	497,405,100	159	523.582.300	159	534.231.964	159	547.790.771	159	562.685.202	159	582.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				497,405,100		523.582.300		534.231.964		547.790.771		562.685.202		582.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	159	159	497,405,100	159	523.582.300	159	534.231.964	159	547.790.771	159	562.685.202	159	582.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	87	87	373,074,000	87	404.304.375	87	412.527.926	87	422.997.885	87	434.499.197	87	449.463.350		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				373,074,000		404.304.375		412.527.926		422.997.885		434.499.197		449.463.350		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	87	87	373,074,000	87	404.304.375	87	412.527.926	87	422.997.885	87	434.499.197	87	449.463.350		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Tegalpanggung)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	198	198	1,132,179,830	198	944.214.600	198	963.419.925	198	987.871.523	198	514.731.750	198	1.049.679.111		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,901,563,750		2.628.594.930		2.682.060.551		2.750.131.248		2.324.907.316		2.922.133.044		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	214	214	487,810,500	214	426.996.800	214	435.681.915	214	446.739.522	214	458.886.370	214	474.690.416		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				487,810,500		426.996.800		435.681.915		446.739.522		458.886.370		474.690.416		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	214	214	487,810,500	214	426.996.800	214	435.681.915	214	446.739.522	214	458.886.370	214	474.690.416		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		295	644,369,330	295	517.217.800	295	527.738.010	295	541.132.001	295	55.845.380	295	574.988.695		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				644,369,330		517.217.800		527.738.010		541.132.001		55.845.380		574.988.695		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		295	644,369,330	295	517.217.800	295	527.738.010	295	541.132.001	295	55.845.380	295	574.988.695		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				47,095,000		45.356.000		46.178.541		47.000.000		48.000.000		49.000.000		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Danurejan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100	47,095,000	100	45.356.000	100	46.178.541	100	47.000.000	100	48.000.000	100	49.000.000	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah				47,095,000		45.356.000		46.178.541		47.000.000		48.000.000		49.000.000		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	47,095,000	12	45.356.000	12	46.178.541	12	47.000.000	12	48.000.000	12	49.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia				47,095,000		45.356.000		46.178.541		47.000.000		48.000.000		49.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	47,095,000	12	45.356.000	12	46.178.541	12	47.000.000	12	48.000.000	12	49.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				49,605,000		37.965.000		38.437.208		39.520.359		40.600.355		41.705.519		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	49,605,000	100	37.965.000	100	38.437.208	100	39.520.359	100	40.600.355	100	41.705.519	7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Daerah				49,605,000		37.965.000		38.437.208		39.520.359		40.600.355		41.705.519		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	20	20	8,615,000	20	4.055.000	20	4.137.479	20	4.242.488	20	4.357.841	20	4.507.925		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				8,615,000		4.055.000		4.137.479		4.242.488		4.357.841		4.507.925		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	20	20	8,615,000	20	4.055.000	20	4.137.479	20	4.242.488	20	4.357.841	20	4.507.925		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	40,990,000	12	33.910.000	12	34.299.729	12	35.277.871	12	36.242.514	12	37.197.594		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40,990,000		33.910.000		34.299.729		35.277.871		36.242.514		37.197.594		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	40,990,000	12	33.910.000	12	34.299.729	12	35.277.871	12	36.242.514	12	37.197.594		

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta ada 8 yaitu :

1. Meningkatkan derajat Pendidikan warga melalui program unggulan :
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan Kesehatan rakyat melalui program unggulan :
   a. Posyandu Paripurna Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu keluarga Jaminan Kesehatan Warga
   c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga melalui program unggulan :
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat melalui program unggulan :
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif
   c. Modernisasi Pasar Tradisional
5. Meningkatkan kualitas kehidupan social melalui program unggulan :
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni
   c. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
6. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui program unggulan :
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga
   c. Penguatan Akses Pendanaan Pembangunan
7. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum melalui program utama :
   a. ASN Sejahtera : Peningkatan Kesejahteraan, Kompetensi, Kualitas, dan Bersih dari Korupsi
   b. Penataan Kelembagaan Yang Adaptif
   c. Perlindungan Hukum bagi Keluarga
8. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY melalui program utama :
   a. Menguatkan Kelembagaan dalam Rangka Melaksanakan sebagian Urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
   c. Mengembangkan Tata Ruang Keistimewaan
   d. Memperkokoh Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kepentingan Sosial, dan Pengembangan Kebudayaan, Memperkuat Akses Dana Keistimewaan untuk warga.

Untuk Program Prioritas Rancangan Akhir Renstra Kemantren Danurejan pada tabel :

TABEL 4.3. DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

:

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.4.01.2.22.04.0000 - Kemantren Danurejan				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Suryatmajan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Bausasran)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Tegalpanggung)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Suryatmajan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Bausasran)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Tegalpanggung)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Suryatmajan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Bausasran)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan (Kelurahan Tegalpanggung)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan	7.01.03.2.02.0004 – Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Danurejan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.4.01.2.22.04.0000 Kemantren Danurejan									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Danurejan	Poin	526,13	526,15	526,19	526,21	526,24	526,27	526,29	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Nilai	AA (90,01)	A (83,5-86,5)	A (84-87)	A (84,5-87,5)	A (85-88)	A (85,5-88,5)	A (86-89)	
4.	"Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan"	Poin	409,67	409,67	409,68	409,69	409,70	409,71	409,72	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Danurejan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kemantren Danurejan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kemantren Danurejan. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Danurejan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Danurejan.

LAMPIRAN : POHON KINERJA, CASCADING RENSTRA, DATA KINERJA
(META DATA RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Disusun oleh :

Kemantren Gedongtengen

KEMANTREN GEDONGTENGEN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

2025

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Gedongtengen Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan lancar tanpa halangan suatu apa.

Rencana Strategis Kemantren merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan, serta target kinerja penyelenggaraan urusan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kemantren.

Demikianlah Renstra Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga bermanfaat dan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan Kemantren Gedongtengen ke depan bisa tercapai.

Yogyakarta, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GEDONGTENGEN

PARGIYAT, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197305241992031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.1.2. Sumber Daya Kemantren Gedongtengen 9

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 18

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 19

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.2.2. Isu Strategis 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 25

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029 25

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029 25

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 28

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 28

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 31

4.1 Uraian Program 43

4.2 Uraian Kegiatan 43

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 44

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 61

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 63

BAB V PENUTUP 65

LAMPIRAN

1. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN 2025-2029
2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra PD dgn dokumen perencanaan lain	2
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Kemantren	8
Gambar 2.2	Susunan Organisasi Kelurahan	9
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	25
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	25
Gambar 4.1	Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Kemantren Gedongtengen Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Komposisi ASN Kemantren Gedongtengen Berdasarkan Diklat sd Tahun 2025	10
Tabel 2.3	Komposisi pegawai Kemantren Gedongtengen Berdasarkan tingkat pendidikan sd Tahun 2025	11
Tabel 2.4	Komposisi ASN Kemantren Gedongtengen Berdasarkan eselon sd Tahun 2025	11
Tabel 2.5	Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gedongtengen	11
Tabel 2.6	Bangunan Gedung	14
Tabel 2.7	Evaluasi Renstra Periode Tahun 2017 - 2022	15
Tabel 2.8	Evaluasi Renstra Periode Tahun 2023 – 2026	16
Tabel 2.9	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan tujuan san Sasaran Renstra PD	27
Tabel 3.2	Penahapan Rentra PD	28
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	28
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir RENSTRA PD	32
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	48
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	62
Tabel 4.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerzner (seorang pakar manajemen proyek yang menulis buku "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling") menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony (seorang ahli teori organisasi Amerika dan profesor pengendalian manajemen di Harvard Business School, yang dikenal karena karyanya dalam bidang sistem pengendalian manajemen) yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan daerah kota tentang RPJMD Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3(tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan..

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

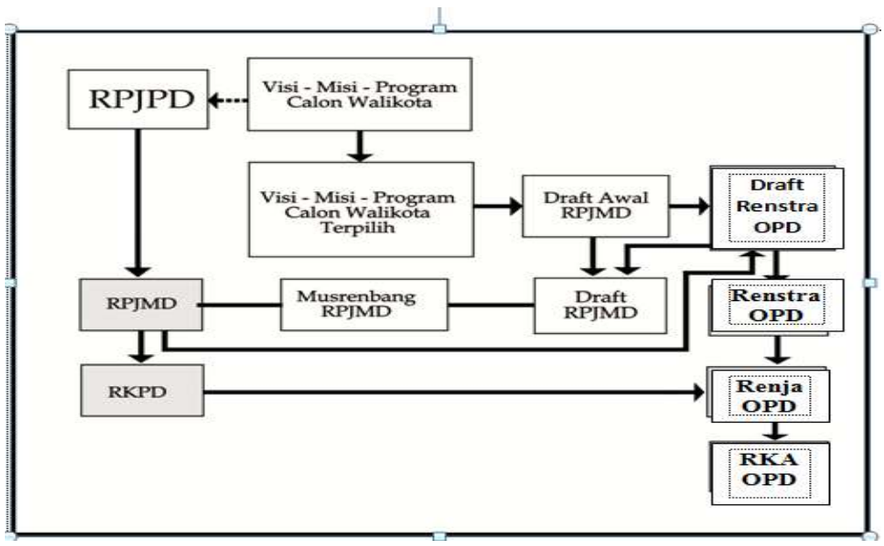

Gambar 1.1. Hubungan Renstra PD dgn dokuemn perencanaan lain

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
j. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;.
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):
p. Peraturan Wali Kota Nomor 38 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
q. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikator kegiatan dan sub kegiatan

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;

3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun
- 3.2. 2025-2029
- Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota tahun
- 3.3. 2025-2029;
- Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program;

4.2. Uraian Kegiatan;

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, yang dimaksud dengan Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dan penyebutan Mantri Anom adalah Sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren yang dipimpin oleh Lurah.

Ketugasan kemantren yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kemantren mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan

sesuai kewenangan Kemantren;

j. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Gedongtengen sebagai mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

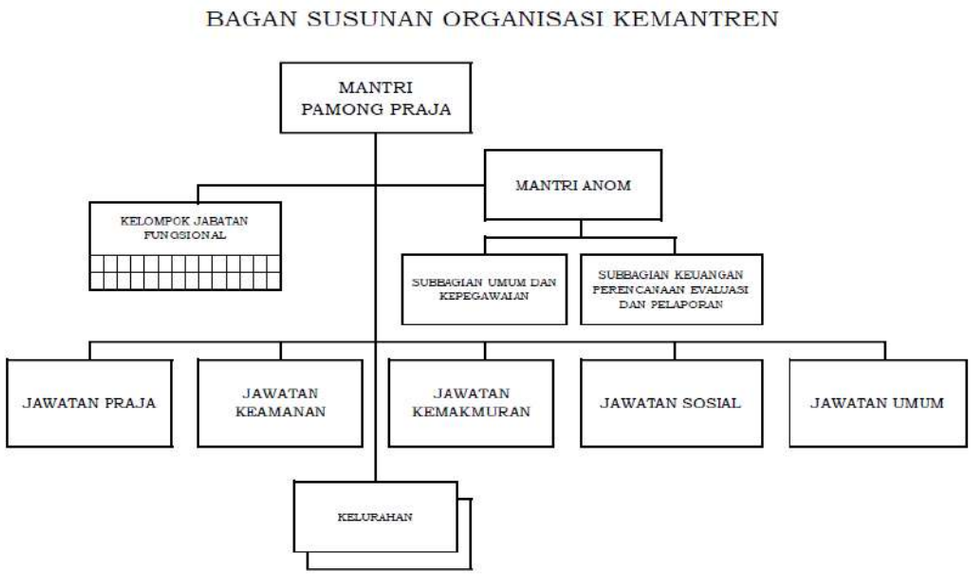

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Kemantren
Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023.

Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;
2. Mantri Anom, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Jawatan Praja;
2. Jawatan Keamanan;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Sosial;
5. Jawatan Umum; dan
6. Kelompok jabatan fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

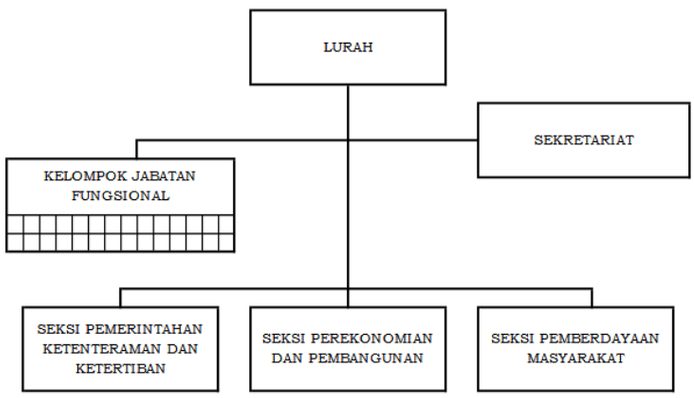

Gambar 2.2. Susunan Organisasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023.

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Kemantren Gedongtengen

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 39 orang, dengan rincian 27 orang ASN, 2 orang P3K dan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) sebanyak 10 orang.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan, jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Gedongtengen adalah 47 orang, dan saat ini baru terpenuhi 80,85 %. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan personil hasil analisis jabatan, namun demikian untuk jabatan struktural di Kemantren Gedongtengen semua telah terisi. Data mengenai komposisi pegawai Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Kemantren Gedongtengen Tahun 2025

	Uraian	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Gol II**	**Gol III**	**Gol IV**	**Jumlah**
1	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	1	1
2	Mantri Anom	1	-	-	1	-	1
3	Kepala Jawatan	1	4	-	5	-	5
4	Kasubag	1	1	-	2	-	2
5	Staf Kemantren	3	6	4	5	-	9
6	Lurah	1	-	-	-	1	1
7	Sekretaris kelurahan	-	2	-	2	-	2
8	Kasi kelurahan	3	3	-	6	-	6
9	PPPK	1	1	2	-	-	2
10	JLOP	8	1	-	-	-	10
	Jumlah	21	18	6	21	2	39

Tabel 2.2
Komposisi ASN Kemantren Gedongtengen
Berdasarkan Diklat sd Tahun 2025

No	**Jenis Diklat**	**Jumlah**	**Jenis Kelamin**	
			Laki – Laki	**Perempuan**
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	13	3	10
3	ADUM/PKP	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat penjenjangan	3	2	1
	Jumlah	17	6	11

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Kemantren Gedongtengen
Berdasarkan tingkat pendidikan sd Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	1	1	-
2	S1	15	6	9
3	D III	12	4	8
4	SLTA	9	8	1
5	SLTP	2	2	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	39	21	18

Tabel 2.4
Komposisi ASN Kemantren Gedongtengen
Berdasarkan eselon sd Tahun 2025

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	6	2	4
4	IV B	10	4	6
	Jumlah	18	8	10

Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gedongtengen

Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)		Grand Total
	Baik	Rusak Ringan	
A.C. Split	15	1	16
Alat Hiasan	6	-	6
ALAT KANTOR LAINNYA	3	-	3
ALAT KEDOKTERAN UMUM	14	-	14

Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)		Grand Total
	Baik	Rusak Ringan	
Alat Pemadam/Portable	7	-	7
ALAT PENDINGIN	3	-	3
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	40	-	40
Alat Tenis Meja	12	-	12
Bangku Tunggu	13	3	16
Brandkas	2	1	3
Camera Digital	7	-	7
Camera Video	2	-	2
CCTV	53	-	53
Digital LED Running Text	2	-	2
Dispenser	7	1	8
Exhause Fan	4	-	4
External/ Portable Hardisk	1	-	1
Facsimile	2	-	2
Filing Cabinet Besi	30	-	30
Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	-	2
Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	-	4
Gergaji Chain Saw	1	-	1
Handrailing Difable (Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE))	4	-	4
Handy Talky (HT)	4	-	4
Jam Elektronik	6	-	6
Jam Mekanis	3	-	3
KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	1	-	1
Kipas Angin	20	-	20
Kompor Gas (Alat Dapur)	1	-	1
Kursi Besi/Metal	1	-	1
Kursi Biasa	1	-	1
Kursi Kayu	7	-	7
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
Kursi Lipat	288	7	295
Kursi Putar	25	3	28
Kursi Rapat	54	1	55
Lambang Garuda Pancasila	3	-	3
LCD Projector/Infocus	5	1	6
Lemari Besi/Metal	6	-	6
Lemari Es	1	-	1
Lemari Kaca	7	-	7
Lemari Kayu	10	1	11
Lemari Sorok	5	-	5
Loudspeaker	7	-	7
Megaphone	3	-	3
Meja 1/2 Biro	17	-	17
Meja Kerja Kayu	48	4	52
Meja Komputer	8	-	8
Meja Panjang	6	-	6

Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)		Grand Total
	Baik	Rusak Ringan	
Meja Rapat	37	1	38
Meja Rapat Pejabat Eselon II	3	-	3
Meja Tambahan	7	-	7
Meja Telepon	3	-	3
Mesin Bor Kayu	1	-	1
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	-	6
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	-	1
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	-	2
MEUBELAIR	1	-	1
Mic Conference	1	-	1
Microphone Cable	6	-	6
Microphone Floor Stand	3	-	3
Microphone/Wireless MIC	4	-	4
Monitor	3	-	3
Note Book	11	-	11
P.C Unit	34	-	34
Papan Nama Instansi	4	-	4
Papan Pengumuman	3	-	3
Papan Tulis	1	-	1
Papan Visual/Papan Nama	1	-	1
PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3	-	3
PERALATAN STUDIO AUDIO	4	-	4
Pesawat Telephone	12	-	12
Pick Up	1	-	1
Pompa Air	3	-	3
Pompa Kebakaran/Portable	1	-	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	-	30
Professional Sound System	3	-	3
Radio	1	-	1
Rak Besi	22	1	23
Rambu Jalan	21	-	21
Roll Meter (Meteran)	4	-	4
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	-	2
Sepeda	1	2	3
Sepeda Motor	12	-	12
Sice	8	1	9
Sofa	5	-	5
Sound System	4	-	4
Stabilisator	1	-	1
Station Wagon	1	-	1
Stationary Generating Set	1	-	1
Tabung Gas	1	-	1
Tangga Aluminium	3	1	4
Telephone (PABX)	1	-	1
Telephone Mobile	1	-	1

Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)		Grand Total
	Baik	Rusak Ringan	
Televisi	5	-	5
Telex	2	-	2
Tempat Tidur Besi	2	-	2
Tiang Bendera	4	-	4
Uninterupted Power Supply (UPS)	13	-	13
Vertikal Blind	1	-	1
Wheel Bin/Tempat Sampah (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4	-	4
White Board	6	-	6
Wireless	6	-	6
Grand Total	1.093	29	1.122

Tabel 2.6. Bangunan Gedung

Nama Bangunan	**Kondisi**	**Total**	**Keterangan**
bekas kantor kelurahan Sosromenduran	Baik	1	Izin Pakai Rotary Club
Eks. Kel Pringgokusuman	Baik	1	Gedung Sekber
Gedung Kelurahan Baru (SD Gedongtengen)	Baik	1	Kantor Kelurahan Pringgokusuman
Kantor Kecamatan Gedongtengen	Baik	1	
Kelurahan Sosromenduran	Baik	1	Kantor Kelurahan Sosromenduran
Rumah Dinas Camat Gedongtengen	Baik	1	
Taman Bantaran Kali Winongo	Baik	1	
Taman Ruang Terbuka Hijau Kampung Jogonegaran	Baik	1	
Taman Ruang Terbuka Hijau Kampung Sitisewu	Baik	1	
Taman RW 01 Jlagran	Baik	1	
Taman RW 05 Pringgokusuman	Baik	1	
Taman RW 16 Kemetiran Kidul	Baik	1	
Taman RW 17 Kemetiran KIdul	Baik	1	
TAman RW 18 Kemetiran	Baik	1	
Taman RW 19 Sutodirjan	Baik	1	
Taman RW 24 Notoyudan	Baik	1	
Grand Total		16	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Renstra tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai diatas 100% dengan adanya dukungan sumber daya dan sarana prasarana memadai mendukung kinerja pelayanan Kemantren Gedongtengen, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Evaluasi Renstra Periode Tahun 2017 - 2022

Tujuan dan Sasaran	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)											
					Target						Realisasi dan prosentase					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	360 poin	361 poin	362 poin	364,5 poin	365,5 poin	366,5 poin	360 poin, 100%	362,5 poin, 100,41 %	362,5 poin, 100,13 %	364,5 poin, 100 %	359,95 poin, 99 %	366,5 poin, 100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	70 poin	82 poin	82,5 poin	83 poin	83,5 poin	84 poin	81,27 poin	82,1 poin	82,54 poin	83,20 poin	83,64 poin	84,76 poin
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	-	-	698.202.000 ruoiah	705.184.000 ruoiah	791.346.000 ruoiah	-	-	-	1.053.334.500 rupiah, 150,86	791.346.000 ruoiah, 112,21	1.348.166.000 rupiah, 170,35 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	-	-	123 pelanggaran	123 pelanggaran	-	-	-	-	275 pelanggaran, 44,72 %	123 pelanggaran, 100%

Tabel 2.8
Evaluasi Renstra Periode Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)						Prosentase (%)	
					Target				Realisasi			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	373,5 poin	375 poin	376 poin	377 poin	373,5 poin	389,5 poin	100	103,87
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	84,76 poin	85 poin	85,5 poin	86 poin	85,02 poin	85,07 poin	100,30	100,15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan	1.022.700.000 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.371.031.533 rupiah	1.346.890.000 rupiah	134,05	98,24
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	168 Pelanggaran	98 Pelanggaran	63,41	120,33
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gedongtengen) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	100	100

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)						Prosentase (%)	
					Target				Realisasi			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	100	100

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 19 tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Walikota melimpahkan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Mantri Pamong Praja. Ayat 2 berbunyi Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintahan umum;
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat FKDM dan FPK

b. Pendidikan;
   Diwujudkan dalam bentuk dukungan kegiatan yang berhubungan dengan balita, anak usia dini dan remaja.

c. Kesehatan;
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis Kewilayahan.

d. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   - Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan

e. Ketenteraman, ketertiban umu dan perlindungan masyarakat;
   Antara lain:
   - Kegiatan untuk Redkar dan KTB.
   - Pengadaan dan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (closed circuit television).

f. Sosial;
   Diwujudkan dalam bentuk bantuan jumat berkah sambang kampung.

g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   Meliputi:
   - Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja operasional posyandu;
   - Pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

h. Pertanahan;
   Berupa mediasi awal terhadap permasalahan tanah yang terjadi di Kemantren antara lain:
   - Pemilik tanah persil dengan pemilik tanah persil lainnya.

i. Lingkungan hidup;
   Meliputi:

- Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan berupa taman, pohon perindang dan /atau pergola
- Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan
- Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah
- Pengolahan sampah

j. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Meliputi:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelayanan e-mobile pembuatan KTP elektronik dan atau pelayanan mobile administrasi kependudukan di Kemantren
- Menyediakan fasilitas sarana prasarana pelayanan administrasi Kependudukan

k. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Berupa fasilitasi koordinasi kegiatan kampung keluarga berkualitas dan rumah data kependudukan

l. Perhubungan;
Meliputi:

- Perencanaan dan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan di jalan Lingkungan
- Pengadaan cermin tikungan
- Pemeliharaan cermin tikungan

m. Kebudayaan; dan
Meliputi:

- Kegiatan yang mendukung pelestarian kebudayaan di Keelurahan berupa pelatihan-pelatihan dan pemberian fasilitasi organisasi kebudayaan yang ada di kemantren/kelurahan.

n. Perdagangan
Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan melalui online single submission (OSS).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Belum optimalnya Pengelolaan sampah

- Belum optimalnya pengurangan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 3R mencakup mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang yang masih

berguna, dan mendaur ulang sampah menjadi barang baru.

- Reduce (mengurangi)
  Antara lain: mengurangi konsumsi: pilih produk dengan kemasan minimal atau yang bisa diisi ulang. Hindari penggunaan alat makan sekali pakai dan beli bahan makanan secukupnya. Memilih produk ramah Lingkungan : pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Mengurangi pemborosan : periksa dokumen sebelum dicetak, gunakan email untuk berkirim surat dan hindari penggunaan kertas yang berlebihan.

- Reuse (menggunakan ulang)
  Antara lain: manfaatkan barang bekas: gunakan kembali botol kaca atau plastik sebagai wadah penyimpanan, kertas bekas untuk catatan, atau pakaian bekas untuk kain lap. Gunakan barang bekas untuk fungsi lainnya: misalnya gunakan botol galon untuk pot tanaman atau kaleng bekas untuk wadah penyimpanan. Donasi barang yang masih berguna **:**

- Recycle (mendaur ulang)
  Mendaur ulang sampah menjadi bahan baku baru dan pemanfaatan bahan baku tersebut untuk membuat produk baru.

- Masih Kurangnya kesadaran masyarakat memilah sampah.

  Memilah sampah dari sumbernya adalah memisahkan jenis-jenis sampah di tempat sampah rumah tangga atau sumber lainnya (seperti sekolah, kantor, dll.) menjadi beberapa kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, terutama dalam proses daur ulang dan pengolahan menjadi produk baru atau pupuk kompos.

Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah, termasuk pelarangan pembuangan sampah langsung ke depo dan mewajibkan penggunaan jasa penggerobak (transporter) di setiap RW. Bank sampah di Kota Yogyakarta memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memberikan nilai ekonomis dari sampah yang dikelola. Selain itu, bank sampah juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Bank Sampah masing-masing RW di Kemantren Gedongtengen diikutkan

dalam upaya memilah sampah.

b.Belum optimalnya program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Peserta yang hadir sebagian besar orang yang sama padahal sudah dilaksanakan di sore hari (kurangnya kaderisasi kelembagaan);
- Kurang kesadaran mempratekkan hasil pelatihan karena terkendala dana, tempat, bahan baku serta belum maksimalnya tindak lanjut keberlangsungan dan pengembangan hasil pelatihan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan swadaya masyarakat masih kurang
- Tidak adanya bantuan transpot masyarakat mengurangi tingkat kehadiran masyarakat.

c. Upaya Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang belum optimal

Kewenangan layanan kesehatan masyarakat yang dilimpahkan ke Kemantren adalah berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan berbasis Posyandu (Pos pelayanan terpadu) di masing-masing RW, edukasi maupun sosialisasi informasi kesehatan serta upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu permasalahan yang saat ini terdeteksi adalah banyak Balita di bawah dua tahun yang mengalami kelambanan pertumbuhan atau yang disebut Stunting. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesehatan belum optimal karena penyebab dari kasus stunting ini ada beberapa hal yaitu faktor orangtua/ibu hamil yang beresiko , kondisi ekonomi sehingga anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup serta faktor pola asuh yang kurang tepat

2.2.2. Isu Strategis

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Kegiatan pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi warga untuk terus mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik. Selain itu untuk peningkatan derajat hidup warga masyarakat, Kemantren Gedeongtengen selalu menganggarkan pendanaan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, sarana prasarana umum serta akses jalan pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman dan layak huni bagi warga masyarakat.

- Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan angka kemiskinan melalui skema "Gandeng Gendong" dapat menggerakkan roda perekonomian di level bawah dan memberikan kesempatan berusaha bagi warga kurang mampu. Selain itu program ini juga mampu merubah skema pasar karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pemesanan jamuan rapat-rapat OPD ke kelompok Gandeng Gendong

b. Pengelolaan sampah

Regulasi baru yang berlaku di pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penanganan sampah rumah tangga, perlu ditindaklanjuti dengan optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah. Keberadaan Bank Sampah di seluruh wilayah Kemantren Gedongtengen perlu didorong lebih aktif dan intensif lagi dalam operasionalisasinya, baik dalam pengelolaan sampah anorganik maupun organik. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah, termasuk pelarangan pembuangan sampah langsung ke depo dan mewajibkan penggunaan jasa penggerobak (transporter) di setiap RW.

c. Pengurangan resiko stunting

Peran serta stakeholder sangat berperan dalam mengurangi angka prevalensi stunting dengan mengkoordinir dan melaksanakan bantuan bahan makanan bergizi secara kosisten dan monitoring dengan penguatan kelembagaan menggerakkan kader, RT, RW, LPMK dan Kampung agar peduli dengan lingkungan masing-masing mencegah stunting. Untuk tahun 2025, melalui dana keistimewaan untuk mengurangi resiko stunting.

Tabel 2.9

Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Lingkungan Hidup	- Belum optimalnya Pengelolaan sampah	- Belum optimalnya Pengelolaan sampah	Isu sampah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dan upaya pengurangan sampah dari sumbernya	pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan, bagaimana mengurangi timbunan sampah, dan meningkatkan penanganan sampah	dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak optimal, termasuk volume sampah yang terus meningkat dan kurangnya infrastruktur pengumpulan serta pembuangan yang memadai	- Pengelolaan Sampah
Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Sosial	- Belum optimalnya program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	- peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;	bagaimana pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka diperhatikan dalam setiap tahapan	memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembangunan, serta perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjut	bagaimana kebijakan, rencana, dan program pembangunan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi mereka	- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan	- Upaya Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang belum optimal	- peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Tumbuh Kembang Anak	Masalah Gizi kronis	Penanganan Stunting	- Pengurangan Resiko Stunting

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kemantren Gedongtengen akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan, adapun tujuan Kemantren Gedongtengen sebagai berikut: Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen.

- Indikator kinerja: Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen.
- Formula Perhitungan: 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.
- Tujuan Kemantren Gedongtengen mendukung Tujuan Pemerintah Kota ke-2 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
- Serta mendukung Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta ke-4 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

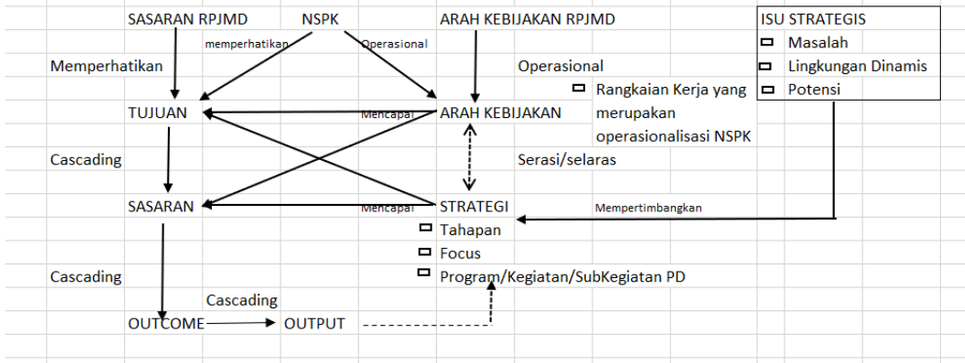

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

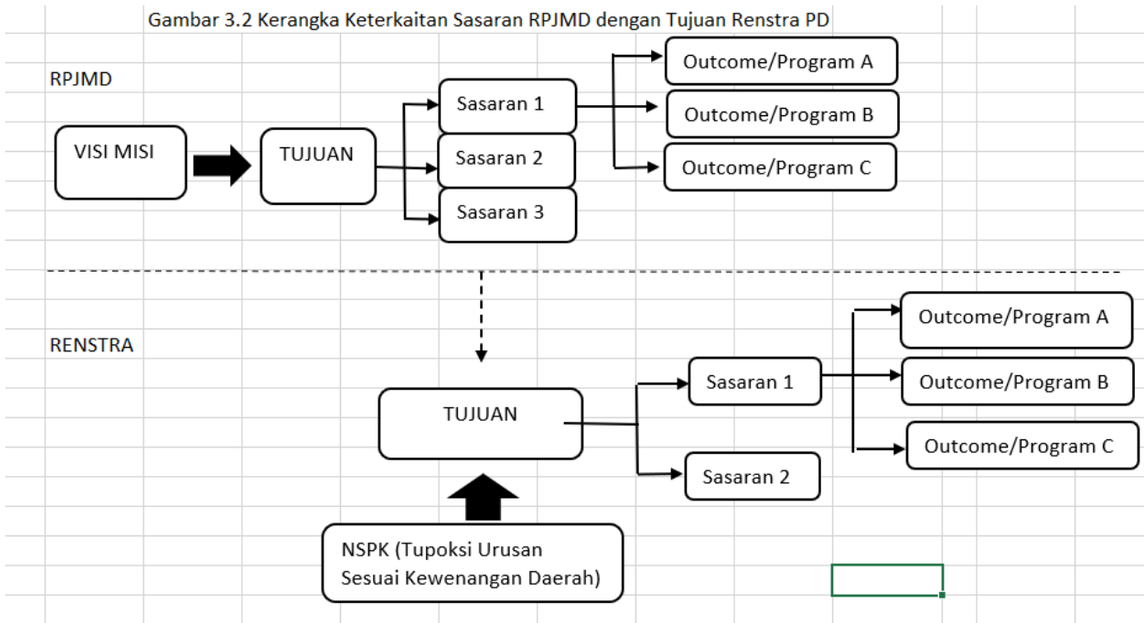

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029

Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen
   - Indikator kinerja : Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen;
   - Formula Perhitungan : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen = Jumlah nilai

perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan

2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Gedongtengen yang baik dan adaptif
   - Indikator kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Gedongtengen;
   - Formula Perhitungan : Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Adapun Teknik Merumuskan tujuan dan Sasaran Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan tujuan san Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen		Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen (Poin)	500.2	500.2	500.8	501.8	502.4	503.4	504	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen (poin)	393	393	393.5	394.5	395	396	396.5	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gedongtengen yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Rentra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap II (2028)	Tahap II (2029)	Tahap II (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berikut Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Dalam hal penyusunan pohon kinerja, perlu dipetakan stakeholdernya (stakeholder mapping), tidak berbasis urusan semata. Inilah nanti yang akan menjadi Cross cutting kinerja. Untuk pencapaian kinerja Kemantren membutuhkan dukungan dari OPD lain. Berikut adalah crosscutting ketugasan, yang mendukung pelaksanaan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Dalam pelaksanaan tugas di Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, kemantren didukung oleh :
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendukung untuk layanan kependudukan.
   b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendukung layanan perijinan.
   c. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, mendukung penyebarluasan Informasi Publik, pengembangan sisten informasi dan digitalisasi.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Dalam melaksanakan tugas di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kemantren didukung oleh :
   a. Dinas Perdagangan, mendukung untuk sektor ekonomi.
   b. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, mendukung sektor ekonomi.
   c. Dinas Pertanian dan Pangan, mendukung sektor ekonomi.
   d. Dinas Pariwisata, mendukung sektor sosial budaya.
   e. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), mendukung sektor sosial budaya.
   f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendukung sektor sosial budaya.
   g. Dinas Lingkungan Hidup, mendukung penanganan persampahan.
   h. Dinas Kesehatan, mendukung penanganan Kesehatan, KB, pembinaan posyandu.
   i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mendukung penanganan Kesehatan, KB.
   j. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendukung Sarpras, pembangunan wilayah sesuai pelimpahan kewenangan.
   k. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, mendukung penanganan pendidikan.
   l. Bagian Tata Pemerintahan, mengkoordinasi kegiatan pembangunan dan membina lembaga sosial masyarakat dan mengkoordinir permasalahan kewilayahan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   Dalam melaksanakan tugas di Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Kemantren didukung oleh :
   a. Satuan Polisi Pamong Praja, mendukung penegakan perda.
   b. Polsek, mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban.
   c. Koramil, mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Dalam melaksanakan tugas di Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kemantren didukung oleh :

   a. Polsek, mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban.
   b. Koramil, mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban.
   c. Puskesmas, mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
   d. KUA, medukung peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama.
   e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mendukung peningkatan antisipasi kebencanaan.
   f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mendukung peningkatan antisipasi kebencanaan.
   g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mendukung peningkatan wasbang

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Dalam melaksanakan tugas di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kemantren didukung oleh :

   a. BAPPEDA, mendukung Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
   b. BPKAD, mendukung Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
   c. BKPSDM, mendukung Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
   d. Sekretariat Daerah, mendukung Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
   e. Inspektorat, mendukung Pengawasan dan Consulting
   f. Dinas Kominfo, mendukung Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
   g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mendukung pengelolaan kearsipan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
8. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Dan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 beserta pemutakhirannya. Sedangkan Program internal menggunakan penyeragaman program internal Perangkat Daerah;
9. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030
10. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Gambar 4.1. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

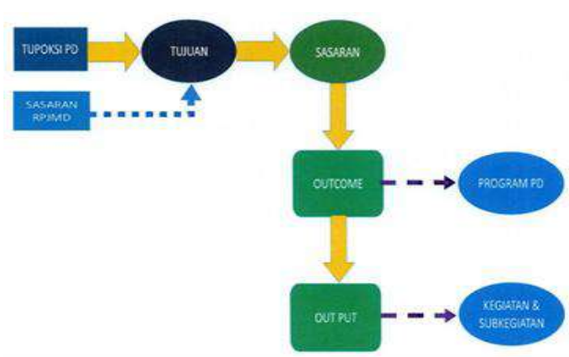

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana terlampir di tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen				Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen(Poin)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen (poin)		
			Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Gedongtengen		Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gedongtengen)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yangBerkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kemantren Gedongtengen)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gedongtengen	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri.	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga(Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas danBerdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	7.01.03.2.06 - Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan KeluargaTanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gedongtengen		Persentase Pelanggaran Perdadan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gedongtengen		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantrenyang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang MengikutiFasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pringgokusuman)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yangBerkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sosromenduran)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yangBerkualitas (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pringgokusuman)	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sosromenduran)	Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon /Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pringgokusuman)	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon /Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan	
			Kelurahan Pringgokusuman	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Kelurahan Sosromenduran	Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Kelurahan Pringgokusuman	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Kelurahan Sosromenduran	Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Kelurahan Pringgokusuman	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Kelurahan Sosromenduran	Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Kelurahan Pringgokusuman	Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Kelurahan Sosromenduran			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Kelurahan Pringgokusuman			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gedongtengen yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen (Nilai)		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Gedongtengen		Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen (NIlai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai IKM Kemantren Gedongtengen (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Gedongtengen	Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasidan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Gedongtengen	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerahdan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasidan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Gedongtengen	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.06 - AdministrasiUmum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.08 - PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara(Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	

*) tambahan indikator

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra

4.1. Uraian Program

Program yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Rentra Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
    a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang mendukung Program dan Kegiatan Rentra Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
      - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
      - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
      - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
      - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
   c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
   - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan:
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Sub kegiatan:
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, terdiri 1 sub kegiatan:
      - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren)
      - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
      - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif sebagai berikut di tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Gedongtengen	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan (%)	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pringgokusuman)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gedongtengen)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kemantren Gedongtengen)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				8.490.617.091		8.490.617.091		8.663.314.187		8.883.194.990		9.124.714.923		9.438.954.764		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.909.691.632		5.387.439.141		5.497.019.653		5.636.534.011		5.789.791.371		5.989.191.786		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Gedongtengen	Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen (Nilai)	A	A	5.387.439.141	A	5.387.439.141	A	5.497.019.653	A	5.636.534.011	A	5.789.791.371	A	5.989.191.786	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
	Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai IKM Kemantren Gedongtengen (Nilai)	85,07	85,31		85,31		85,42		85,5		85,61		85,72			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Gedongtengen			7.130.000		3.300.000		3.367.123		3.452.580		3.546.454		3.668.595		
Meningkatnya kualitas perencanaan, peranggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.130.000	1	3.300.000	1	3.367.123	1	3.452.580	1	3.546.454	1	3.668.595		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.990.000		1.100.000		1.122.374		1.150.860		1.182.152		1.222.865		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3	2.990.000	3	1.100.000	3	1.122.374	3	1.150.860	3	1.182.152	3	1.222.865		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				345.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				345.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				345.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				345.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	345.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.415.000		1.155.000		1.178.493		1.208.403		1.241.259		1.284.008		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	2.415.000	5	1.155.000	5	1.178.493	5	1.208.403	5	1.241.259	5	1.284.008		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen			4.697.126.000		4.166.980.571		4.251.736.956		4.359.646.040		4.478.184.817		4.632.413.502		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATANOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.697.126.000	1	4.166.980.571	1	4.251.736.956	1	4.359.646.040	1	4.478.184.817	1	4.632.413.502		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30		30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.694.021.000		4.165.495.571		4.250.221.751		4.358.092.379		4.476.588.911		4.630.762.633		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.694.021.000	30	4.165.495.571	30	4.250.221.751	30	4.358.092.379	30	4.476.588.911	30	4.630.762.633		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				690.000		330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan (Dokumen)	12	12	690.000	12	330.000	12	336.712	12	345.258	12	354.646	12	366.860		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	345.000	12	165.000	12	168.356	12	172.629	12	177.323	12	183.430		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran				920.000		440.000		448.950		460.344		472.861		489.146		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran (Laporan)	12	12	920.000	12	440.000	12	448.950	12	460.344	12	472.861	12	489.146		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				460.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen			1.725.000		825.000		841.778		863.145		886.613		917.152		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	1.725.000	3	825.000	3	841.778	3	863.145	3	886.613	3	917.152		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	230.000	3	110.000	3	112.237	3	115.086	3	118.215	3	122.287		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	230.000	1	110.000	1	112.237	1	115.086	1	118.215	1	122.287		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	230.000	2	110.000	2	112.237	2	115.086	2	118.215	2	122.287		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	230.000	2	110.000	2	112.237	2	115.086	2	118.215	2	122.287		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	230.000	2	110.000	2	112.237	2	115.086	2	118.215	2	122.287		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				230.000		110.000		112.237		115.086		118.215		122.287		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	230.000	1	110.000	1	112.237	1	115.086	1	118.215	1	122.287		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gedongtengen			690.000		990.000		1.010.136		1.035.774		1.063.937		1.100.579		
Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	690000	2	990.000	2	1.010.136	2	1.035.774	2	1.063.937	2	1.100.579		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				345.000		330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	345.000	12	330.000	12	336.712	12	345.258	12	354.646	12	366.860		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				345.000		660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	345.000	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen			222.137.897		192.544.770		196.461.130		201.447.313		206.924.666		214.051.152		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	222.137.897	12	192.544.770	12	196.461.130	12	201.447.313	12	206.924.666	12	214.051.152		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				18.208.587		18.195.850		18.565.954		19.037.157		19.554.778		20.228.244		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	18.208.587	3	18.195.850	3	18.565.954	3	19.037.157	3	19.554.778	3	20.228.244		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.922.060		40.059.070		40.873.871		41.911.250		43.050.817		44.533.487		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	51.922.060	3	40.059.070	3	40.873.871	3	41.911.250	3	43.050.817	3	44.533.487		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.350.600		15.347.600		15.659.770		16.057.215		16.493.811		17.061.858		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	15.350.600	3	15.347.600	3	15.659.770	3	16.057.215	3	16.493.811	3	17.061.858		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.312.650		22.527.250		22.985.454		23.568.825		24.209.661		25.043.442		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	22.312.650	3	22.527.250	3	22.985.454	3	23.568.825	3	24.209.661	3	25.043.442		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				114.344.000		96.415.000		98.376.081		100.872.866		103.615.599		107.184.121		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	114.344.000	12	96.415.000	12	98.376.081	12	100.872.866	12	103.615.599	12	107.184.121		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen			4.612.500		45.100.000		46.017.334		47.185.254		48.468.221		50.137.467		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	4.612.500	3	45.100.000	3	46.017.334	3	47.185.254	3	48.468.221	3	50.137.467		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	39	39		39		39		39		39		39			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.612.500		11.100.000		11.325.774		11.613.222		11.928.986		12.339.820		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	39	39	1.612.500	39	11.100.000	39	11.325.774	39	11.613.222	39	11.928.986	39	12.339.820		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		34.000.000		34.691.560		35.572.032		36.539.235		37.797.647		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3.000.000	3	34.000.000	3	34.691.560	3	35.572.032	3	36.539.235	3	37.797.647		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen			680.660.000		712.664.000		727.159.586		745.614.896		765.888.165		792.265.353		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	680.660.000	12	712.664.000	12	727.159.586	12	745.614.896	12	765.888.165	12	792.265.353		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.100.000		1.100.000		1.122.374		1.150.860		1.182.152		1.222.865		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.100.000	12	1.100.000	12	1.122.374	12	1.150.860	12	1.182.152	12	1.222.865		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.000.000		117.000.000		119.379.780		122.409.639		125.737.957		130.068.372		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	117.000.000	12	117.000.000	12	119.379.780	12	122.409.639	12	125.737.957	12	130.068.372		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				562.560.000		594.564.000		606.657.432		622.054.397		638.968.056		660.974.116		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	562.560.000	12	594.564.000	12	606.657.432	12	622.054.397	12	638.968.056	12	660.974.116		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen			295.610.235		265.034.800		270.425.610		277.289.009		284.828.498		294.637.986		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	295.610.235	1	265.034.800	1	270.425.610	1	277.289.009	1	284.828.498	1	294.637.986		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13		13			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30		30		30			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17		17		17		17		17		17			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.940.000		26.940.000		27.487.960		28.185.604		28.951.971		29.949.076		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.940.000	1	26.940.000	1	27.487.960	1	28.185.604	1	28.951.971	1	29.949.076		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.792.900		65.284.800		66.612.693		68.303.323		70.160.490		72.576.818		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	58.792.900	13	65.284.800	13	66.612.693	13	68.303.323	13	70.160.490	13	72.576.818		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				250.000		250.000		255.085		261.559		268.671		277.924		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30	250.000	30	250.000	30	255.085	30	261.559	30	268.671	30	277.924		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.350.000		15.880.000		16.202.999		16.614.231		17.065.972		17.653.724		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17	22.350.000	17	15.880.000	17	16.202.999	17	16.614.231	17	17.065.972	17	17.653.724		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				187.277.335		156.680.000		159.866.873		163.924.292		168.381.394		174.180.444		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	187.277.335	3	156.680.000	3	159.866.873	3	163.924.292	3	168.381.394	3	174.180.444		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				78.321.900		74.986.000		76.511.166		78.453.161		80.585.961		83.360.971		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen (Poin)	115	115,5	78.321.900	115,5	74.986.000	115,75	76.511.166	116	78.453.161	116,5	80.585.961	116,75	83.360.971	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik			1.760.000		1.760.000		1.795.798		1.841.376		1.891.443		1.956.584		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	9.660.000	1	1.760.000	1	1.795.798	1	1.841.376	1	1.891.443	1	1.956.584		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				9.660.000		1.760.000		1.795.798		1.841.376		1.891.443		1.956.584		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	9.660.000	1	1.760.000	1	1.795.798	1	1.841.376	1	1.891.443	1	1.956.584		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP			68.661.900		73.226.000		74.715.368		76.611.785		78.694.518		81.404.387		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	68.661.900	2	73.226.000	2	74.715.368	2	76.611.785	2	78.694.518	2	81.404.387		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non				13.569.900		7.980.000		8.142.313		8.348.965		8.575.973		8.871.330		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	13.569.900	2	7.980.000	2	8.142.313	2	8.348.965	2	8.575.973	2	8.871.330		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				55.092.000		65.246.000		66.573.055		68.262.820		70.118.545		72.533.057		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	55.092.000	12	65.246.000	12	66.573.055	12	68.262.820	12	70.118.545	12	72.533.057		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.708.880.169		2.885.289.950		2.943.974.836		3.018.698.394		3.100.763.657		3.207.539.693		
Kelurahan Pringgokusuman				1.357.273.486		1.468.156.400		1.498.018.701		1.536.038.415		1.577.803.300		1.632.142.846	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan			2.564.691.169		2.694.856.950		2.749.670.341		2.819.456.974		2.896.118.009		2.995.860.313		
Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	81	81	1.357.273.486	81	1.468.156.400	100	1.498.018.701	100	1.536.038.415	100	1.577.803.300	100	1.632.142.846		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	292	292		292	2694856950	292		292		292		292			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				833.452.286		724.785.000		739.527.127		758.296.325		778.914.402		805.740.214		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	81	81	833.452.286	81	724.785.000	100	739.527.127	100	758.296.325	100	778.914.402	100	805.740.214		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				523.821.200		743.371.400		758.491.574		777.742.090		798.888.898		826.402.632		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	292	292	523.821.200	292	743.371.400	292	758.491.574	292	777.742.090	292	798.888.898	292	826.402.632		
Kelurahan Sosromenduran				1.142.851.848		1.195.660.000		1.219.979.725		1.250.942.811		1.284.955.945		1.329.209.827		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan			2.564.691.169				2.749.670.341		2.819.456.974		2.896.118.009		2.995.860.313		
Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	70	70	1.142.851.848	70	1.195.660.000	70	1.219.979.725	70	1.250.942.811	70	1.284.955.945	70	1.329.209.827		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	192	192		192		192		192		192		192			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				595.248.248		656.905.000		670.266.448		687.277.811		705.964.894		730.278.325		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	70	70	595.248.248	70	656.905.000	70	670.266.448	70	687.277.811	70	705.964.894	70	730.278.325		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				547.603.600		538.755.000		549.713.277		563.665.000		578.991.051		598.931.502		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	192	192	547.603.600	192	538.755.000	192	549.713.277	192	563.665.000	192	578.991.051	192	598.931.502		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	187	187,5	221.473.550	187,5	221.473.550	187,75	225.976.410	188	231.717.168	188,25	238.004.412	188,5	246.187.020		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)			68.120.000		83.088.000		84.778.010		86.929.676		89.293.294		92.368.555		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	68.120.000	12	83.088.000	12	84.778.010	12	86.929.676	12	89.293.294	12	92.368.555		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				68.120.000		83.088.000		84.778.010		86.929.676		89.293.294		92.368.555		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	68.120.000	12	83.088.000	12	84.778.010	12	86.929.676	12	89.293.294	12	92.368.555		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri.(Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (Dokumen)			2.564.691.169		2.694.856.950		2.749.670.341		2.819.456.974		2.896.118.009		2.995.860.313		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	184	184	64.565.835	184	31.040.550	184	31.671.915	184	32.475.748	184	33.358.764	184	34.507.640		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				56.424.060		27.177.175		27.729.959		28.433.745		29.206.859		30.212.743		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	184	184	56.424.060	184	27.177.175	184	27.729.959	184	28.433.745	184	29.206.859	184	30.212.743		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				8.141.775		3.863.375		3.941.956		4.042.003		4.151.905		4.294.897		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	8.141.775	1	3.863.375	1	3.941.956	1	4.042.003	1	4.151.905	1	4.294.897		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun				0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan			38.605.000		57.649.000		58.821.581		60.314.472		61.954.422		64.088.133		
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga)	184	184	38.605.000	184	38.902.500	184	39.693.777	184	40.701.205	184	41.807.870	184	43.247.734		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	184	184		184		184		184		184		184			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.514.000		32.403.500		33.062.587		33.901.716		34.823.503		36.022.825		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga)	184	184	7.514.000	184	32.403.500	184	33.062.587	184	33.901.716	184	34.823.503	184	36.022.825		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.365.000		6.499.000		6.631.190		6.799.489		6.984.367		7.224.909		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	184	184	11.365.000	184	6.499.000	184	6.631.190	184	6.799.489	184	6.984.367	184	7.224.909		
Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	19.726.000	1	18.746.500	1	19.127.804	1	19.613.267	1	20.146.552	1	20.840.399		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				19.726.000		18.746.500		19.127.804		19.613.267		20.146.552		20.840.399		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	19.726.000	1	18.746.500	1	19.127.804	1	19.613.267	1	20.146.552	1	20.840.399		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana			37.464.000		49.696.000		50.704.904		51.997.272		53.397.932		55.222.692		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan PanganKeluarga (Keluarga)	52	52	37.464.000	52	28.144.000	52	28.716.449	52	29.445.273	52	30.245.889	52	31.287.558		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	52	52		52		52		52		52		52			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				920.000		3.864.500		3.943.104		4.043.180		4.153.114		4.296.147		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikut Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	52	52	920.000	52	3.864.500	52	3.943.104	52	4.043.180	52	4.153.114	52	4.296.147		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian				18.873.000		24.279.500		24.773.345		25.402.093		26.092.775		26.991.411		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	52	52	18.873.000	52	24.279.500	52	24.773.345	52	25.402.093	52	26.092.775	52	26.991.411		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	2	2	9.590.000	2	15.330.000	2	15.639.900	2	16.042.317	2	16.465.363	2	17.018.165		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				9.590.000		15.330.000		15.639.900		16.042.317		16.465.363		17.018.165		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	2	2	9.590.000	2	15.330.000	2	15.639.900	2	16.042.317	2	16.465.363	2	17.018.165		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	6	6	8.081.000	6	6.222.000	6	6.348.555	6	6.509.682	6	6.686.680	6	6.916.969		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				8.081.000		6.222.000		6.348.555		6.509.682		6.686.680		6.916.969		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan\ Berdaya Saing (Keluarga)	6	6	8.081.000	6	6.222.000	6	6.348.555	6	6.509.682	6	6.686.680	6	6.916.969		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				101.800.000		96.318.000		98.277.044		100.771.499		103.511.037		107.075.481		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gedongtengen	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100	101.800.000	100	96.318.000	100	98.277.044	100	100.771.499	100	103.511.037	100	107.075.481	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP			101.800.000		96.318.000		98.277.044		100.771.499		103.511.037		107.075.481		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian		12	101.800.000	12	96.318.000	12	98.277.044	12	100.771.499	12	103.511.037	12	107.075.481		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				101.800.000		96.318.000		98.277.044		100.771.499		103.511.037		107.075.481		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian		12	101.800.000	12	96.318.000	12	98.277.044	12	100.771.499	12	103.511.037	12	107.075.481		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				55.840.000		46.584.000		47.531.488		48.737.925		50.062.897		51.786.833		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gedongtengen	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	55.840.000	100	46.584.000	100	47.531.488	100	48.737.925	100	50.062.897	100	51.786.833	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan			55.840.000		46.584.000		47.531.488		48.737.925		50.062.897		51.786.833		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40	40	920.000	40	1.760.000	40	1.795.798	40	1.841.376	40	1.891.443	40	1.956.584		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				920.000		1.760.000		1.795.798		1.841.376		1.891.443		1.956.584		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40	920.000	40	1.760.000	40	1.795.798	40	1.841.376	40	1.891.443	40	1.956.584		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		12	54.920.000	12	44.824.000	12	45.735.690	12	46.896.549	12	48.171.454	12	49.830.249		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				54.920.000		44.824.000		45.735.690		46.896.549		48.171.454		49.830.249		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		12	54.920.000	12	44.824.000	12	45.735.690	12	46.896.549	12	48.171.454	12	49.830.249		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis dari Wali Kota terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi-Misi calon kepala daerah di KPUD, meliputi:

a. Meningkatkan derajat pendidikaan warga, melalui program uggulan:
    a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
    c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program uggulan:
    a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
    b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
    c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program uggulan:
    a. Bela Beli Produk Warga
    b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
    c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
    a. Revitalisasi Kampung Wisata
    b. Ekonomi Olahraga; dan
    c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program uggulan:
    a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
    b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
    c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:
    a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
    b. Kampung Layak Huni
    c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program uggulan:
    a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
    b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
    c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
    d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
    e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
    a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah

b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan

c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Kemantren Gedongtengen mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

No.	Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Gedongtengen	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kemantren Gedongtengen akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan, adapun tujuan Kemantren Gedongtengen sebagai berikut: Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen. Dengan indikator kinerja yaitu Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen.

Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen
   Indikator kinerja : Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen;
2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Gedongtengen yang baik dan adaptif
   Indikator kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Gedongtengen;

Target Tujuan dan sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA Rancangan Akhir Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.05.0000 - Kemantren Gedongtengen									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen	poin	-	500,2	500,8	501,8	502,4	503,4	504	
3.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	poin	393	393	393,5	394,5	395	396	396,5	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Kemantren Gedongtengen pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029. Renstra juga sebagai pedoman bagi para fasilitator Pembangunan agar dapat melaksanakan Pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditentukan pada saat merumuskan Rencana strategis Instansi. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Semoga dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 menjadi instrument Pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, sosial, dan lignkungan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

POHON SINERGI & RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANGTA TAHUN 2021-2026

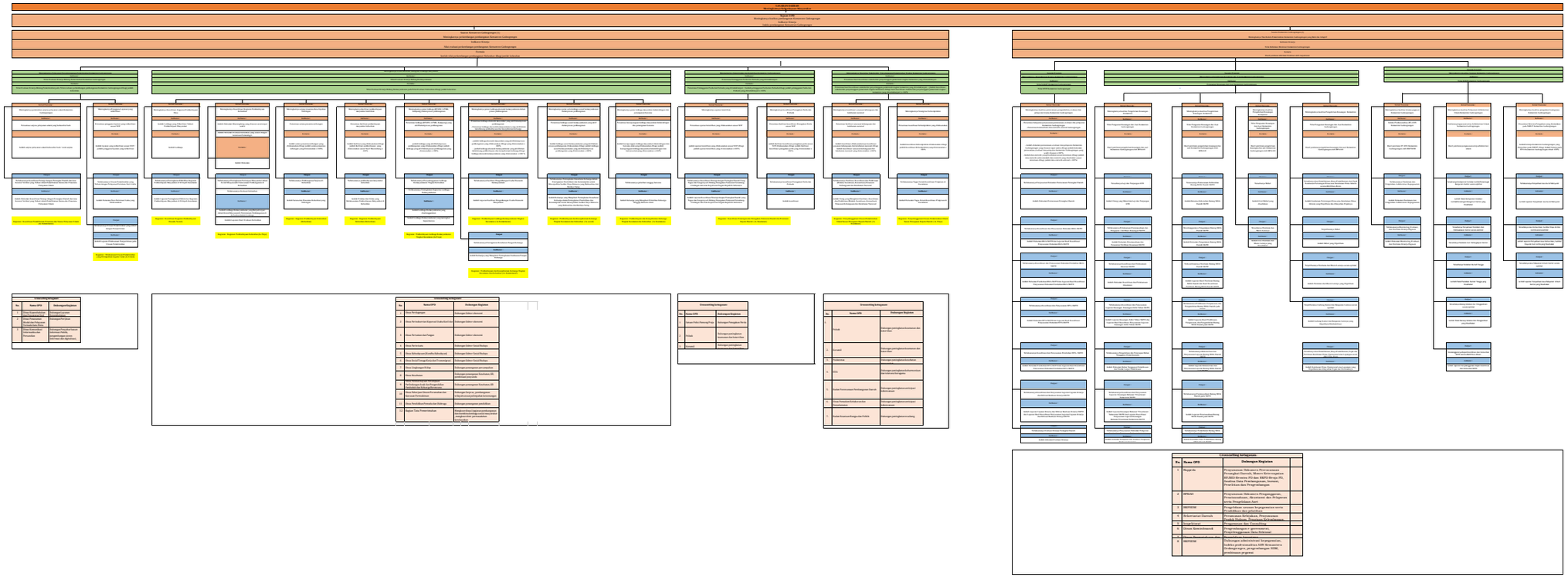

Keterangan Singkatan

No.	Nama OPD	Keterangan Singkatan
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan
2	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Perhubungan Kominfo
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perkim
6	Dinas Sosial	Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Naker
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPPA
9	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pangan
10	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukcapil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PMD
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
17	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
23	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
29	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
35	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
40	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
41	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
44	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
46	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
47	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
48	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
52	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
53	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
58	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
59	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
60	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
62	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
64	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
65	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
66	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
70	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
71	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
72	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
74	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
76	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
77	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
78	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
82	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
83	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
84	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
86	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
88	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
89	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
90	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
92	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
94	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
95	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
96	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
98	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
100	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
101	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
102	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
103	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
104	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
105	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
106	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
107	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
108	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
110	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
111	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
112	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
113	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
114	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
115	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
116	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
117	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
118	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
119	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
120	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
121	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
122	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
123	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
124	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
125	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
126	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
127	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
128	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
129	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
130	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
131	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
132	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
134	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
135	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
136	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
137	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
138	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
139	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
140	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
141	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
142	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
143	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
144	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
145	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
146	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
147	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
148	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
149	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
150	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
151	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
152	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
153	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
154	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
155	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
156	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
157	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
158	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
159	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
160	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
161	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
162	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
163	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
164	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
166	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
167	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
168	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
169	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
170	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
171	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
172	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
173	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
174	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
175	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
176	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
177	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
178	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
179	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
180	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
181	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
182	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
184	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
185	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
186	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
188	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
189	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
190	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
191	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
192	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
193	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
194	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
195	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
196	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
197	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
198	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
199	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
200	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
202	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
203	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
204	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
205	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
206	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
207	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
208	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
209	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
210	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
211	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
212	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
213	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
214	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
215	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
216	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
217	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
218	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
219	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
220	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
221	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
222	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
223	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
224	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
225	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
226	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
227	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
228	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
229	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
230	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
231	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
232	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
233	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
234	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
235	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
236	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
237	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
238	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
239	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
240	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
241	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
242	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
243	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
244	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
245	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
246	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
247	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
248	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
249	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
250	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
251	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
252	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
253	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
254	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
255	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
256	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
257	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
258	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
259	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
260	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
261	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
262	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
263	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
264	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
265	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
266	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
268	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
269	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
270	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
271	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
272	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
273	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
274	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
275	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
276	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
277	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
278	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
279	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
280	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
281	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
282	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
283	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
284	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
285	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
286	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
287	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
288	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
289	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
290	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
291	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
292	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
293	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
294	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
295	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
296	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
297	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
298	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
299	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
301	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
302	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
303	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
304	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
305	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
306	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
307	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
308	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
309	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
310	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
311	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
312	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
313	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
314	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
315	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
316	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
317	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
318	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
319	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
320	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
321	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
322	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
323	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
324	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
325	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
326	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
327	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
328	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
329	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
330	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
331	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
332	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
334	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
335	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
336	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
337	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
338	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
339	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
340	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
341	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
342	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
343	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
344	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
345	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
346	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
347	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
348	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
349	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
350	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
351	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
352	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
353	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
354	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
356	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
357	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
358	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
359	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
360	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
361	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
362	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
363	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
364	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
365	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
366	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
367	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
368	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
369	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
370	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
371	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
372	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
373	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
374	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
375	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
376	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
377	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
378	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
379	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
380	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
381	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
382	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
383	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
384	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
385	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
386	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
387	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
388	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
389	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
390	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
391	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
392	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
393	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
394	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
395	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
396	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
397	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
398	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
399	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
400	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
401	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
402	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
403	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
404	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
405	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
406	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
407	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
408	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
409	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
410	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
411	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
412	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
413	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
414	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
415	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
416	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
417	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
418	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
419	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
420	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
421	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
422	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
423	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
424	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
425	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
426	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
427	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
428	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
429	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
430	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
431	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
432	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
433	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
434	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
435	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
436	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
437	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
438	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
439	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
440	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
441	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
442	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
443	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
444	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
445	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
446	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
447	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
448	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
449	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
450	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
451	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
452	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
453	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
454	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
455	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
456	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
457	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
458	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
459	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
460	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
461	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
462	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
463	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
464	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
465	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
466	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
467	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
468	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
469	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpusda
470	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
471	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
472	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pora
473	Dinas Perdagangan dan Koperasi	Perdagangan
474	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata
475	Din

CASCADING KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030							2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen	Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen		565,2	566,8	501,9	501,4	503,4	Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Gedongtengen yang Baik dan Akuntif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat	A (85,201)	A (85,094)	A (85,257)	A (85,268)	A (85,280)	A (85,270)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gedongtengen	Nilai SAKIP Kemantren Gedongtengen; Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen; Nilai IKM Kemantren Gedongtengen	* Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat * Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	A (86,43-89,63) Terbaiknya dua Tertinggi (4,308 - 4,589) 85,25	A (86,45-89,45) Terbaiknya dua Tertinggi (4,310 - 4,589) 85,31	A (86,47-89,47) Terbaiknya dua Tertinggi (4,280 - 4,589) 85,42	A (86,49-89,49) Terbaiknya dua Tertinggi (4,370 - 4,589) 85,5	A (86,51-89,51) Terbaiknya dua Tertinggi (4,380 - 4,589) 85,61	A (86,53-89,53) Terbaiknya dua Tertinggi (4,39 - 4,589) 85,72	Mantri Arum	Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Gedongtengen	Persentase terlaksana perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen Pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen yang wajib disusun x100% Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x100%	Sub Bagian Keuangan dan PEP Sub Bagian Keuangan dan PEP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Pendapatan Daerah Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Aset Tetap Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Keuangan Daerah Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Risiko Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Data dan Informasi Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Inovasi Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Zona Integritas Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Pelayanan Publik Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Whistleblowing System Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Gratifikasi Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Penanganan Konflik Kepentingan Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Penanganan Pelanggaran Disiplin Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Sekretariat Tim Pengelola Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030							2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
																														Jawatan Praja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	Cthitung dari jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan dibagi dengan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	Jawatan Praja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanakanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Wilayah Perbatasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Praja	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokum en	12 dokumen

Bajawakarta, 12 September 2025
Jawatan Praja

PAMONG, SUP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197205241992031002

YOGYAKARTA CITY

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029

KEMANTREN NGAMPILAN

Jl. WakhidHasyim No. 12
Yogyakarta, 55262
No. Telp/No. Faks : (0274) 376984
Alamat Email : ng@jogjakota.go.id

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMANTREN NGAMPILAN

TAHUN 2025 - 2029

Disusun oleh:

Kemantren Ngampilan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

Jl. Wahid Hasyim No 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274) 376984
EMAIL: ng@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE:
www.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kemantren Ngampilan dapat tersusun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusunlah Renstra Kemantren Ngampilan 2025-2029. Penyusunan Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2025-2030 untuk memberikan pedoman bagi Kemantren, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Kemantren Ngampilan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Kami menyadari bahwa Rencana strategis ini masih terdapat kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Yogyakarta, September 2025

Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan

Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN NGAMPILAN

Anif Luhur Kurniawan, S.IP.

NIP. 197305171993111001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
Daftar Lampiran vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KEMANTREN NGAMPILAN 8
2.1. Gambaran Pelayanan 8
A. Tugas Fungsi dan Struktur 8
B. Sumber Daya Kemantren Ngampilan 22
C. Kinerja Pelayanan Kemantren Ngampilan 25
D. Kelompok Sasaran Layanan 29
E. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan 29
2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kemantren Ngampilan 29
1. Permasalahan Kemantren Ngampilan 29
2. Isu Strategis 34
BAB III TUJUAN,SASRAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43
3.1 Tujuan, Jangka Menengah Kemantren Ngampilan 43
3.2 Sasaran, Jangka Menengah Kemantren Ngampilan 44
3.3 Strategi Renstra Kemantren Ngampilan 46
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kemantren Ngampilan 50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53
4.1 Program Renstra Kemantren Ngampilan 54
4.2 Program Penunjang Program Strategis Walikota 58
4.3 Program Prioritas 67
4.4 Indikator Kinerja Utama 71
BAB V. PENUTUP 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Kemantren Ngampilan.....22
Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Kemantren Ngampilan Th 2024.....24
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Layanan Daerah.....27
Tabel 2.4 Indikator Program Kemantren Ngampilan Tahun 2020 – 2025.....27
Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategi.....40
Tabel 2.6 Data Crosscutting Kemantren Ngampilan.....41
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....46
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD.....,,,.....48
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....51
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....59
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan / SubkegiatanPendanaan.....63
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....69
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kemantren Ngampilan.....72

DAFTAR GAMBAR

2.1. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan.....21
3.1 Konsep Renstra PD.....45
3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kemantren Ngampilan.....45
4.1 Kerangka Prumusan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD.....53

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Pohon Kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2025 -2029
2. Data Kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2025 - 2029
3. Casading Kemantren Ngampilan Tahun 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah habis pada tahun 2025 dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Walikota Yogyakarta periode 2024 sd 2029. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2025 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2024 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan rencana strategis PD Tahun 2025-2029 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1564 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta. Dalam penyusunan Renstra Kemantren Ngampilan terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dokumen Renstra ini suatu dokumen perencanaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun dan akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kematren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43)

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029(Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51)

16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2025-2030 adalah memberikan pedoman bagi Kemantren, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan , serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan diselesaikan oleh Kemantren Ngampilan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra PD Kematren Ngampilan Tahun 2025-2030 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kemantren Ngampilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan untuk periode tahun 2025-2029

3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis adalah :

BAB I PENDAHULUAN
- 1. Latar Belakang
- 2. Dasar Hukum Penyusunan
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KEMATREN NGAMPILAN
- 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIIJAKAN KEMANTREN NGAMPILAN

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENU

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KEMANTREN NGAMPILAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kemantren Ngampilan

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Kemantren Ngampilan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengkoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;

j. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

l. pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

m. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

n. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;

p. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

r. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

s. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Dalam melaksnakan tugas dan fungsinya Mantri Pamong Praja dibantu oleh;

1. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja, dipimpin oleh Mantri Anom. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan

Kemantren;

b. pengkoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengkoordinasian program kegiatan jawatan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
g. pengkoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
h. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
i. pengkoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalianinternal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budayapemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaanpada Sekretariat Kemantren;
l. pengkoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
m. pengkoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
o. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dankpenyusunan laporan Kemantren; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut :
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
   c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
   d. pengelolaan aset Kemantren;
   e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
   f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
   g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
   h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
   i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
   j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
   k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
   l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
   m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
   c. penatausahaan keuangan Kemantren;
   d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
   e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
   f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
   g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
   h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
   i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
   j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
   k. k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
   l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
   m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
   o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
   p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian

Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;

   b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

   c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

   d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;

   e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;

   f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;

   g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;

   h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;

   i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;

   j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;

   k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan

urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;

l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
   d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
   e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
   f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di

bidang keamanan dan ketertiban;

g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;

h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;

i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;

j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;

l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;

n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;

p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;

s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;

t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;

u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
   b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
   c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
   e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
   f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
   g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
   h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
   i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
   j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
   k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;

l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;

r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
   f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
   g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
   i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
   j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
   k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
   l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
   m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di

tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;

o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan sebagai berikut :

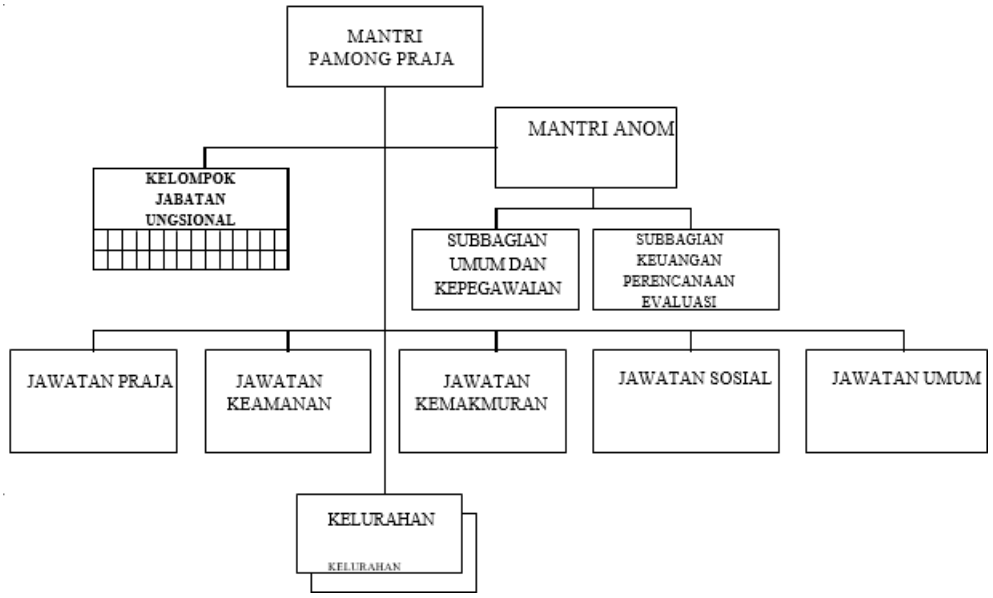

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
c. Masing-masing Jawatan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja.

B. Sumber Daya Kemantren Ngampilan

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kemantren Ngampilan sampai dengan akhir tahun 2024 terdiri atas PNS 29 orang, PJLOP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) sebanyak 9 orang. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1 orang Total jumlah pegawai (PNS, PPPK dan PJLOP) Kemantren Ngampilan adalah 39 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 51 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 76% atau tedapat kekurangan 12 orang. Jabatan struktural sudah terisi semua, dan masih ada beberapa jabatan fungsional umum yang belum terpenuhi. Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 DATA PEGAWAI KEMANTREN NGAMPILAN

NO	Uraian	Laki-laki	Perem-puan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	1	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Jawatan	1	4	-	-	5	-	5
4.	Kasubbag	1	1	-	-	2	-	2
5.	JFU Kemantren	3	5	-	4	4	-	8
7.	Lurah	-	2	-	-	2	-	2
8.	Sekretaris Kel.	2	-	-	-	2	-	2
9.	Kasi Kelurahan	4	2	-	-	6	-	6
10.	JFU Kelurahan	1	0	1	-	-	-	1
11.	JFT	1	-	-	-	1	-	1
12.	PJLOP	8	1	-	-	-	-	9
13	PPPK	1	-					1
	Jumlah	24	15	1	4	23	1	39

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Ngampilan.

Tabel 2.2 SARANA PRASARANA KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2024

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KEMANTREN	KELURAHAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	0	1	Baik
2.	Pendopo Kemantren	1	0	1	Baik
3.	Rumah Dinas MPP	1	0	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	2	0	2	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	1	-	1	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	0	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	1	0	1	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	14	0	14	Baik
9.	Sound System	2	0	2	Baik
10.	Wireless / Sound System	1	0	1	Baik
11.	Telepon	4	0	4	Baik
12.	Telepon 3 digit	1	2	3	Baik
13.	Laptop	4	3	7	Baik
14.	Komputer	14	4	18	Baik
15.	Notebook	1	0	1	Baik
16.	Komputer Tablet	0	0	0	Baik
17.	PC Kiosk	1	0	1	Baik
18.	Ruang Rapat	4	0	4	Baik
19.	AC	9	0	9	Baik
20.	Almari	33	0	33	Baik
21.	Kursi	491	0	491	Baik
22.	Meja	68	0	68	Baik

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KEMANTREN	KELURAHAN	JUMLAH	KONDISI
23.	Meja Komputer	2	0	2	Baik
24.	Printer	13	2	13	Baik
25.	Sepeda	2	4	6	Baik
26.	Sepeda Listrik	0	0	0	Baik
27.	Kamera	1	0	1	Baik
28.	Radio	1	0	1	Baik
29.	Televisi	3	1	4	Baik
30.	Alat Pemadam Kebakaran	37	0	37	Baik
31.	CCTV	1		1	Baik

C. Kinerja Pelayanan Kemantren Ngampilan

Kemantren Ngampilan sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran perangkat daerah meningkatnya tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang juga dituangkan ke dalam tabel perjanjian kinerja Kemantren Ngampilan.

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaima tertuang dalam tabel 2.1.

Dalam perkembangan terjadi beberapa perubahan terkait nomenklatur Program dan Indikatornya sebagai dampak dari tindak lanjut disahkanya beberapa peraturan Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan RPJMD, di awal Renstra tahun 2023 Kemantren Ngampilan memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program

Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat dan tingkat Swadaya masyarakat. Pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari disahkannya Permendagri 90 Tahun 2019 terjadi pemecahan program menjadi 3 (tiga) program dan pergantian indikator program yang disempurnakan dengan Kepmendagri 50 tahun 2020 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program angka pelanggaran perda. Mendasarkan pada pemetaan pemutakhiran Kepmendagri 20 Tahun 2020 dan perubahan nomenklatur kecamatan menjadi kemantren terdapat 3 (tiga) kinerja program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat , kinerja program pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda dan kinerja program swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat hambatan berupa perbedaan pemahaman antara stake holder Kemantren dengan Lembaga sosial masyarkat namun dapat diminimalkan dengan upaya pendekatan secara intensif baik secara formal maupun informal serta monitoring ke lapangan secara berkala untuk menyelaraskan tujuan pembangunan sehingga pada periode 2023-2026 semua indikator kinerja Kemantren Ngampilan dapat tercapai sesuai target.

Kemantren Ngampilan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 telah dapat mencapai target dari sasaran Kemantren Ngampilan mendekati 100%. Adapun target program Kemantren Ngampilan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat mencapai lebih dari 100% seperti pada indikator angka Swadaya masyarakat dan jumlah pelanggaran perda. Adapun target dan capaian sasaran maupun program Kemantren Ngampilan tahun 2020 sampaidengan 2024 dapat dilihat pada dua tabel berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Layanan Daerah

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tujuan Daerah 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta														
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Ngampilan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren/ Kecamatan Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Ngampilan	389	374	374	396.5	389	389	403	403	405	405	407
		Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Ngampilan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan							A	A (85,74)	A	A (86,96)	A

Tabel 2.4 Indikator Program Kemantren Ngampilan Tahun 2020 -2025

Program PD pada RPJMD 2017-2022	Indikator Program PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Nilai survei kepuasan masyarakat	83.80	83.80	84	84.16	84.20	84.20	84.40	84.40	84,6	84,62	84,80
	Tingkat swadaya masyarakat											
	Angka swadaya masyarakat	338.235.000	493.257.000	684.460.000	692.230.000	684.460.000	722.994.000	700.000.000	773.290.000	775.000.000	780.670.000	800.000.000

Program PD Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020	Indikator Program PD	2020		2021		2022		2023		2024		2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,80	83,80	84,00	84,16	84,20	82,30	84.40	84.40	84,60	84,62	84,8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	338.235.000	493.257.000	684.460.000	692.230.000	684.460.000	725.000.000	700.000.000	773.290.000	775.000.000	780.670.000	800.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda			72	70	70	70	68	67	66	65	64

D. Kelompok Sasaran Layanan

Kemantren Ngampilan bertugas memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di wilayah Kemantren Ngampilan yang terdiri dari 2 Kelurahan : Ngampilan dan Notoprajan. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat umum Kemantren Ngampilan juga bertugas memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Ngampilan seperti kelompok atau organisasi kemasyarakatan seperti:Posyandu Lansia dan Balita, UMKM, Bank Sampah, Kelompok Tani, PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang taruna, Sanggar kesenian, Sanggar Olah raga, Kelompok senam, kelompok rentan dan lain-lain.

E. Mitra Prangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemantren Ngampilan bersama-sama dengan mitra kerja seperti Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, Linmas, FKTB, Bappeda, BPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Tata Pemerintahan, Satpol PP/BKO, Dinas Kominfosan dan lain-lain. Melalui kegiatan Forum komunikasi Pimpinan Tingkat Kemantren yang sudah rutin dilaksanakan untuk dapat bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta koordinasi selalu dilakukan setiap saat sesuai pelaksanaan kegiatan yang terkait seperti perencanaan anggaran, evaluasi keuangan, administrasi kependudukan, penyelenggaraaan pemerintahan, menanggulangi pelanggaran perda, konsultasi jaringan internet dan lain-lain.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEMANTREN NGAMPILAN

A. Permasalahan Kemantren Ngampilan

Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong

Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020, Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 menyebutkan Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Pelayanan Publik

   Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Untuk itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

   Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pula azas- azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

   a) kepentingan umum;
   b) kepastian hukum;
   c) kesamaan hak;
   d) keseimbangan hak dan kewajiban;

e) profesionalisme;
f) partisipatif;
g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h) keterbukaan;
i) akuntabilitas;
j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k) ketepatan waktu; dan
l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung dengan 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Ngampilan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran , sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Ngampilan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Kemantren Ngampilan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Melihat nilai SKM yang masih berada pada angka delapan puluhan berarti menunjukkan bahwa Kemantren masih perlu meningkatkan pelayanannya. Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun pada bulan Juli untuk penilaian semester I dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Ngampilan.

2.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kewilayahan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di wilayah Kelurahan maupun Kemantren. Peran aktif masyarakat ini mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan unsur-unsur kelompok atau tokoh dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat

(*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksananya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat yang dilaporkan oleh kelurahan. Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan wallikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk pembangunan kewilayahan yang berada di atas tanah persil atau tanah warga maka harus menggunakan sistem hibah dengan diawali adanya proposal dari LPMK setempat. Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan selalu dilaksanakan agar pembangunan dapat sesuai dengan harapan. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian

tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

3.Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

4.Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan yang mampu memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam suatu wilayah. Kualitas lingkungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk biofisik, sosial ekonomi, dan budaya. Kualitas lingkungan hidup dapat terwujud dengan terjaganya kebersihan lingkungan Permasalahan sampah di wilayah Kemantren Ngampilan yang masih ditemukannya pembuangan sampah liar juga mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup. Berbagai upaya menangani sampah telah dilakukan seperti bududaya magot, pemilahan sampah, mengolah sampah dan pengadaan gerobak serta pengarahan untuk membuang sampah pada penggerobak sudah dimasukkan dalam kegiatan di kemantren Ngampilan.

2. Isu strategis

Berdasarkan permasalahan pelayanan publik, pembangunan kewilayahan, pengarusutamaan gender, dan kualitas lingkungan hidup maka isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah **:**

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:

   Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.

   Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

   Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.

   Murah: biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin

   Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.

   Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.

2) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

   Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta,

Kemantren Ngampilan terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure)*

  Kemantren Ngampilan telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

  Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Ngampilan telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.
- Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat Kemantren Ngampilan memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whantsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Ngampilan. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.
- Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan

gratifikasi.

b) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai titik ungkit perekonomian baru di wilayah

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Ngampilan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya, seperti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan ketrampilan warga masyarakat. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun perencanaan kewilayahan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh yang ada di wilayah melalui musrenbang Kelurahan yang diwujudkan dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder dan Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Ngampilan dalam menggandeng stakeholder bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Ngampilan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif dalam pola tumata, tumanja dan krasa. Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus

memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas. Pembangunan meliputi sarana prasarana fasilitas umum seperti MCK, Ruang publik, Balai RW, jalan umum, dan saluran air hujan.

c) Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Ngampilan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kematren Ngampilan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Ngampilan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat

dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Ngampilan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

d) Penanganan Sampah di Masyarakat

Permasalahan sampah di wilayah Kemantren Ngampilan yang masih ditemukannya pembuangan sampah liar. Hal initentu akan mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah ini Kemantren Ngampilan mengadakan pemantauan sampah di wilayah. Untuk mengurangi volume sampah Kemanten Ngampilan melakukan berbagai upaya menangani sampah seperti bududaya magot dan pemilahan sampah dari rumah. Kegiatan lomba Bank Sampah juga sudah dimasukkan dalam kegiatan di Jawatan Kemakmuran di kemantren Ngampilan. Untuk sarana prasarana pengolahan sampah di wilayah dilakukan pendataan penggerobak sampah dan difasilitasi dengan kegiatan pengadaan gerobak sampah melalui sistem hibah.

Tabel 2.5. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Ngampilan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan sistem pelayanan yang mudah diakses warga	Masih adanya warga yang belum bisa memanfaatkan sistem pelayanan					Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
Pembangunan fisik berupa fasilitas umum di wilayah	Belum optimlnya pembangunan fisik fasilitas umum di wilayah	Kurangnya ruang terbuka hijau publik	Komitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan dan new urban agenda		Dinamika perkembang-an wilayah perkotaan Regional DIY	Peningkatan pembangunan fisik sarana umum di wilayah
Adanya pengamanan insidentil maupun rutin dari kemantren	Masih ditemukan adanya pembuangan sampah liar di wilayah	Pengelolaan persampaha n yang belum optimal		*Transisi menuju pembangunan rendah karbon dan kota berketahanan Lingkungan		Potensi pembuangan sampah liar dan penambahan volume sampah pada tahun mendatang
Permasalahan penyetaraan gender dapat diikutsertakan dalam kegiatan di kemantren	Masih minimnya penyetaraan gender dalam pembangunan	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Disrupsi informasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan yang meningkat	Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya *		Penyetaraan gender dengan melibatkan kelompok afirmasi gender dalam kegiatan

Adapun Crosscutting Ketugasan untuk Kemantren Ngampilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Data Crosscutting Kemantren Ngampilan

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dinas Perdagangan	Dukungan Sektor ekonomii
2	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dukungan Sektor ekonomi
3	Dinas Pertanian dan Pangan	Dukungan Sektor ekonomi
4	Dinas Pariwisata	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Dinas Kebudayaan	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Dinas Sosial	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	Dinas Lingkungan Hidup	Dukungan penanganan persampahan
8	Dinas Komunikasi informatika Dan Persandian	Dukungan jaringan internet dan cctv
9	Badan Perecanaan Pembangunan Daerah	Dukungan perencanaan anggaran
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah	Dukungan pelaksanaan anggaran
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dukungan pelayanan masyarakat
12	Dinas Kesehatan	Dukungan penanganan Kesehatan
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
14	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dukungan Sarana Prasarana
15	Polisi Sektor	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Dukungan Penegakan Peraturan daerah
17	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
18	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
19	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama

BAB III
TUJUAN , SASARAN, STRATEGI,
DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Jangka Menengah Kemantren Ngampilan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kemantren Ngampilan adalah untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2025 – 2045. Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu "Terwujudnya masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban". Adapun Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Tujuan Kemantren Ngampilan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam RPD Kota Yogyakarta 2025-2029:

1. **Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Ngampilan**.

Dengan indikoator tujuan: **Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan**

Formula perhitungan: 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren Ngampilan.

Tujuan Kemantren Ngampilan Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan, pada awal Renstra target indikator tujuan adalah 525.6 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 526.08

3.2 Sasaran Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kemantren Ngampilan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
Adapun sasaran Kemantren Ngampilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan.

   Dengan indikator sasaran: Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan.

   Sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan target pada awal Renstra adalah 407 dan target akhir renstra adalah 407.6

2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan yang Baik dan Adaptif.
   Dengan indikator sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan.

   Sasaran Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan yang baik dan adaptif target pada awal Renstra adalah A(89,43 dan target akhir renstra adalah A(89,55)

Konsep Renstra Kemantren Ngampilan dapat digambarkan sebagai berikut:

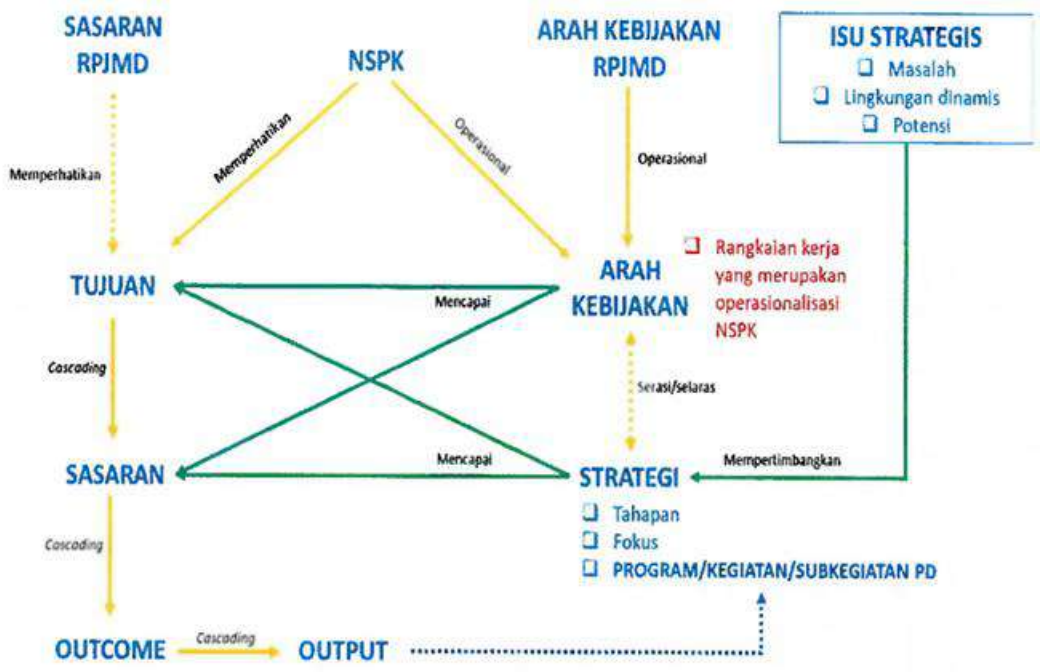

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Adapun keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan renstra dapat digambarkan:

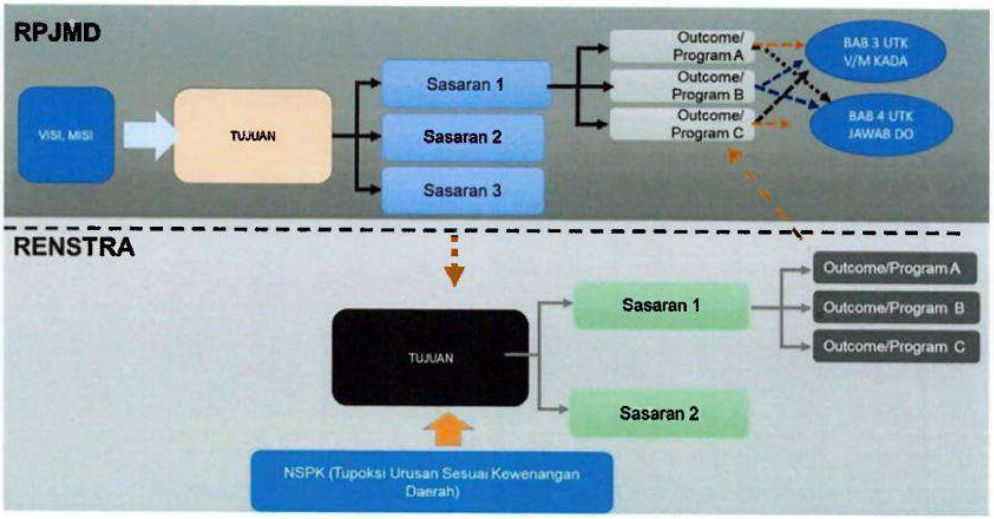

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kemantren Ngampilan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan											
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Ngampilan		Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan (Poin)	524	525,6	525,76	525,84	525,92	526,08	526,16	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan kemantren Ngampilan (poin)	405	407	407,2	407,3	407,4	407,6	407,7	
		Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Ngampilan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan (poin)	89,41 (A)	89,43 (A)	89,45 (A)	89,48 (A)	89,5 (A)	89,53 (A)	89,6 (A)	

Keterangan:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.3. Strategi Renstra Kemantren Ngampilan:

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Strategi Renstra untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025- 2029, yaitu Membangunan "Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Strategi Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.3.1. Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. RPJMD 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar III - 6 pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar

pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan.

Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kemantren Ngampilan 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi Kota "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kemantren Ngampilan akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya.
3. Akselerasi Pembangunan Prioritas Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah Kemantren Ngampilan di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target tujuan, sasaran maupun program yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode yang telah berjalan.
4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses

terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh programdan kegiatan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya tujuan Kemantren Ngampilan.Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan.

3.3.2. Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode 2025–2029, Kemantren Ngampilan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Ngampilan pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan usaha yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, menuju kesejahteraan yang merata.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Kemantren Ngampilan:

Arah kebijakan Renstra Kemantren Ngampilan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuandan sasaran Renstra Kemantren Ngampilan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dirumuskan dengan berdasar pada empat misi pembangunan Kota Yogyakarta yang telah dijabarkan sebagaimana dalam bab sebelumnya. Rumusan misi pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan periode pembangunan 5 tahunan sehingga terbagi menjadi empat tahapan dengan tema pembangunan yang spesifik sesuai dengan misi yang ditetapkan, sekaligus menjadi arah kebijakan prioritas. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Arah kebijakan dalam Renstra Kemantren Kraton 2025-2029 selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari misi dan aspek strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Ngampilan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2.		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
3.		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban Kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
4.		Meningkatkan sinergitas *stakeholder* penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Yogyakarta 2023-2026, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kemantren, Pelimpahan Kewenangan dari Walikota Yogyakarta, Evaluasi Kinerja periode 2023-2026, Perumusan masalah dan Isu strategis Kemantren Ngampilan pada Periode 2025-2029 akan melaksanakan Program, Kegiatan dengan Pendanaan sebagai berikut:

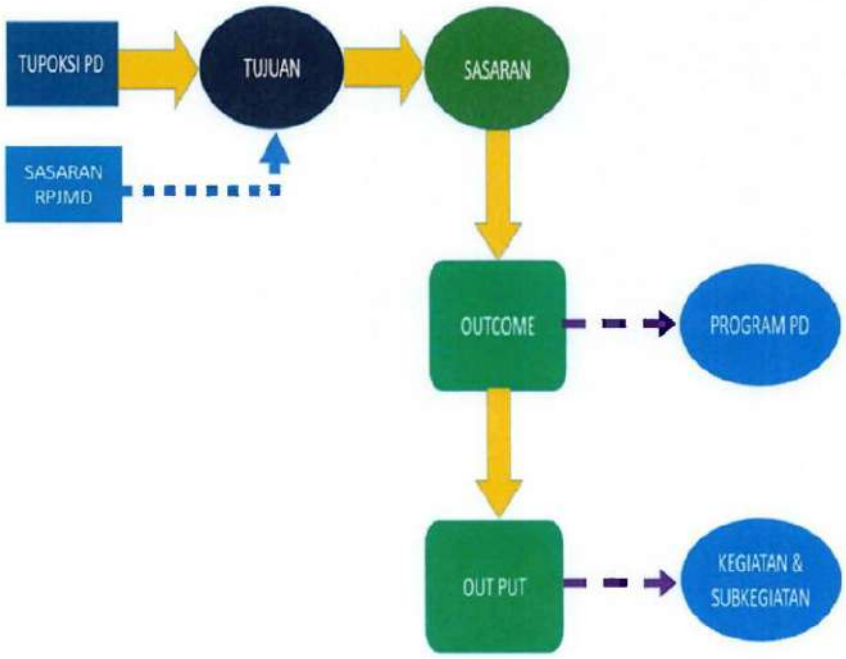

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Dengan Sub Kegiatan

1. Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan:

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Ngampilan

Dengan Sub Kegiatan :

- Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Ngampilan

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Notoprajan

Dengan Sub Kegiatan :

- Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Notoprajan

3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Ngampilan, terdiri dari kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari) sub kegiatan:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Dengan Sub Kegiatan

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Dengan Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Kelurahan Ngampilan serta Kelurahan Notoprajan. Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Kelurahan Kelurahan Notoprajan
   3) Evaluasi Kelurahan

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat,

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
2) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

6.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4.2 Program Pendukung Program Strategis Walikota

Program – program di Kemantren Ngampilan mendukung program strategis

Walikota sebagai berikut;

1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mendukung program strategis Walikota: Penataan kelembagaan yang adaptif

2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mendukung program strategis Walikota: Posyandu paripurna

3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mendukung program strategis Walikota: Jogja tangguh bencana.

4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung program strategis Walikota: Modernisasi Pasar Tradisional

5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Program ini mendukung program strategis Walikota: Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan keistimewaan.

6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Program ini mendukung program strategis Walikota: Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut untuk menggambarkan / merumuslkan program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahun 2025 sampai dengan 2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Ngampilan							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Ngampilan				Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Ngampilan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Ngampilan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Notoprajan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Ngampilan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Notoprajan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Ngampilan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Ngampilan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Notoprajan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Ngampilan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Ngampilan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Notoprajan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Ngampilan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Operasi Ketertiban		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Ngampilan		Nilai Sakip Kemantren Ngampilan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Ngampilan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Ngampilan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Ngampilan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Ngampilan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	1	1	60.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				60.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				60.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				240.000.000		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Kelurahan Ngampilan				100.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				100.000.000		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi(Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Kelurahan Notoprajan				100.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				100.000.000		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping(Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping(Laporan)	1	1	40.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Ngampilan)				40.000.000		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Kemantren dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping(Laporan)	3	3	40.000.000	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping(Laporan)	3	3	40.000.000	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00		
7.01 - KECAMATAN						8.395.369.109,00		8.566.130.808,00		8.783.539.524,00		9.006.699.398,00		9.316.974.450,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.976.582.420		5.619.450.389,00		5.733.750.011,00		5.879.272.586,00		6.028.406.208,00		6.236.109.668,00		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Ngampilan	Nilai IKM Kemantren Ngampilan (Nilai)	84,62	84,62		85		85,2		85,4		85,6		85,8		7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
	Nilai Sakip Kemantren Ngampilan (Nilai)	A	A		A	5.619.450.389,00	A	5.733.750.011,00	A	5.879.272.586,00	A	6.028.406.208,00	A	6.236.109.668,00		
	Nilai SPIP Kemantren Ngampilan (Nilai)	4,443	4,443		4,447		4,449		4,451		4,453		4,455			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.709.900		12.269.000,00		12.518.552,00		12.836.273,00		13.162.057,00		13.615.358,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	13.709.900	12	12.269.000,00	12	12.518.552,00	12	12.836.273,00	12	13.162.057,00	12	13.615.358,00		

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4		4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		6		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.920.000		3.440.000,00		3.509.970,00		3.599.053,00		3.690.397,00		3.817.494,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6	3.440.000,00	6	3.509.970,00	6	3.599.053,00	6	3.690.397,00	6	3.817.494,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.590.000,00		4.630.000,00		4.724.174,00		4.844.074,00		4.967.016,00		5.138.080,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4	4.630.000,00	4	4.724.174,00	4	4.844.074,00	4	4.967.016,00	4	5.138.080,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.199.900,00		4.199.000,00		4.284.408,00		4.393.146,00		4.504.644,00		4.659.784,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan)	12	12		12	4.199.000,00	12	4.284.408,00	12	4.393.146,00	12	4.504.644,00	12	4.659.784,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.523.597.000		4.247.920.143,00		4.334.322.839,00		4.444.327.953,00		4.557.124.996,00		4.714.072.381,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)	12	12		12	4.247.920.143,00	12	4.334.322.839,00	12	4.444.327.953,00	12	4.557.124.996,00	12	4.714.072.381,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	30	30		30		30		30		30		30		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.520.878.000,00		4.242.841.143,00		4.329.140.532,00		4.439.014.119,00		4.551.676.297,00		4.708.436.029,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	30	30		30	4.242.841.143,00	30	4.329.140.532,00	30	4.439.014.119,00	30	4.551.676.297,00	30	4.708.436.029,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				880.000,00		880.000,00		897.899,00		920.688,00		944.055,00		976.568,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12	880.000,00	12	897.899,00	12	920.688,00	12	944.055,00	12	976.568,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.839.000,00		4.199.000,00		4.284.408,00		4.393.146,00		4.504.644,00		4.659.784,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12	4.199.000,00	12	4.284.408,00	12	4.393.146,00	12	4.504.644,00	12	4.659.784,00	

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.591.402		150.977.746,00		154.048.633,00		157.958.387,00		161.967.371,00		167.545.528,00	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Dokumen)	5	5		5	150.977.746,00	5	154.048.633,00	5	157.958.387,00	5	161.967.371,00	5	167.545.528,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	147	147		147		147		147		147		147		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.953.400,00		8.953.400,00		9.135.512,00		9.367.371,00		9.605.115,00		9.935.916,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Dokumen)	0	0		0	8.953.400,00	0	9.135.512,00	0	9.367.371,00	0	9.605.115,00	0	9.935.916,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.894.702,00		53.521.046,00		54.609.664,00		55.995.657,00		57.416.827,00		59.394.263,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Dokumen)	5	5		5	53.521.046,00	5	54.609.664,00	5	55.995.657,00	5	57.416.827,00	5	59.394.263,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.458.300,00		33.458.300,00		34.138.842,00		35.005.286,00		35.893.720,00		37.129.899,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Dokumen)	1	1		1	33.458.300,00	1	34.138.842,00	1	35.005.286,00	1	35.893.720,00	1	37.129.899,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.285.000,00		55.045.000,00		56.164.615,00		57.590.073,00		59.051.709,00		61.085.450,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	147	147		147	55.045.000,00	147	56.164.615,00	147	57.590.073,00	147	59.051.709,00	147	61.085.450,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64.985.000,00		69.175.000,00		70.582.020,00		72.373.391,00		74.210.228,00		76.766.028,00	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Ngampilan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Dokumen)	9	9		9	69.175.000,00	9	70.582.020,00	9	72.373.391,00	9	74.210.228,00	9	76.766.028,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.985.000,00		69.175.000,00		70.582.020,00		72.373.391,00		74.210.228,00		76.766.028,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Dokumen)	9	9		9	69.175.000,00	9	70.582.020,00	9	72.373.391,00	9	74.210.228,00	9	76.766.028,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				643.948.000		657.472.000,00		670.844.981,00		687.871.026,00		705.329.193,00		729.620.730,00	
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	36	36		36	657.472.000,00	36	670.844.981,00	36	687.871.026,00	36	705.329.193,00	36	729.620.730,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	48	48		48		48		48		48		48		

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.240.000,00		105.240.000,00		107.380.582,00		110.105.901,00		112.900.389,00		116.788.678,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	36	36		36	105.240.000,00	36	107.380.582,00	36	110.105.901,00	36	112.900.389,00	36	116.788.678,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				538.708.000,00		552.232.000,00		563.464.399,00		577.765.125,00		592.428.804,00		612.832.052,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48		48	552.232.000,00	48	563.464.399,00	48	577.765.125,00	48	592.428.804,00	48	612.832.052,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.751.118		481.636.500,00		491.432.986,00		503.905.556,00		516.612.363,00		534.489.643,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Ngampilan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit))	15	15		15	481.636.500,00	15	491.432.986,00	15	503.905.556,00	15	516.612.363,00	15	534.489.643,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)	82	82		82		82		82		82		82			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.694.000,00		25.140.000,00		25.651.348,00		26.302.379,00		26.969.933,00		27.898.778,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	1		1	25.140.000,00	1	25.651.348,00	1	26.302.379,00	1	26.969.933,00	1	27.898.778,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.554.000,00		71.989.068,00		73.816.151,00		75.689.605,00		78.296.355,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	15	15		15	70.554.000,00	15	71.989.068,00	15	73.816.151,00	15	75.689.605,00	15	78.296.355,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.930.000,00		47.410.000,00		48.374.319,00		49.602.060,00		50.860.960,00		52.612.611,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)	82	82		82	47.410.000,00	82	48.374.319,00	82	49.602.060,00	82	50.860.960,00	82	52.612.611,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.053.118,00		3.100.000,00		3.163.054,00		3.243.332,00		3.243.332,00		3.440.183,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	3		3	3.100.000,00	3	3.163.054,00	3	3.243.332,00	3	3.243.332,00	3	3.440.183,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				161.074.000,00		335.432.500,00		342.255.197,00		350.941.634,00		359.848.533,00		372.241.716,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3		3	335.432.500,00	3	342.255.197,00	3	350.941.634,00	3	359.848.533,00	3	372.241.716,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				63.083.000		27.622.000,00		28.183.813,00		29.899.171,00		29.684.813,00		30.707.022,00		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Ngampilan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan(Nilai)	116,50	116,50		116,9	27.622.000,00	117,1	28.183.813,00	117,3	29.899.171,00	117,5	29.684.813,00	117,7	30.707.022,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				6.290.000		5.330.000,00		5.438.412,00		5.576.439,00		5.717.969,00		5.914.896,00		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum(Dokumen)	3	3	6.290.000	3	5.330.000,00	3	5.438.412,00	3	5.576.439,00	3	5.717.969,00	3	5.914.896,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6.290.000		5.330.000,00		5.438.412,00		5.576.439,00		5.717.969,00		5.914.896,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum(Dokumen)	3	3	6.290.000	3	5.330.000,00	3	5.438.412,00	3	5.576.439,00	3	5.717.969,00	3	5.914.896,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				56.793.000		22.292.000,00		22.745.401,00		23.322.732,00		23.966.844,00		24.792.126,00		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)	1	1		1	22.292.000,00	1	22.745.401,00	1	23.322.732,00	1	23.966.844,00	1	24.792.126,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				10.024.000		8.886.000,00		9.066.741,00		9.206.855,00		9.532.809,00		9.861.119,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)	1	1	10.024.000	1	8.886.000,00	1	9.066.741,00	1	9.206.855,00	1	9.532.809,00	1	9.861.119,00		

7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				46.769.000		13.406.000,00		13.678.660,00		14.025.877,00		14.434.035,00		14.931.007,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	1	1	46.769.000	1	13.406.000,00	1	13.678.660,00	1	14.025.877,00	1	14.434.035,00	1	14.931.007,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.457.053.220		2.608.668.470,00		2.661.728.788,00		2.729.283.463,00		2.798.552.677,00		2.894.934.832,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan(Nilai)	185	185		191,5	474.755.670,00	191,5	484.412.202,00	192	496.706.582,00	192	509.312.995,00	192	526.853.735,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99.416.000		133.257.500,00		135.967.958,00		139.418.824,00		142.957.274,00		147.880.723,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa(Lembaga)	6	6		6	133.257.500,00	6	135.967.958,00	6	139.418.824,00	6	142.957.274,00	6	147.880.723,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15		15		15		15		15		15			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				54.128.500		80.796.000,00		82.439.391,00		84.531.702,00		86.677.117,00		89.662.277,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa(Lembaga)	6	6		6	80.796.000,00	6	82.439.391,00	6	84.531.702,00	6	86.677.117,00	6	89.662.277,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99.416.000		52.461.500,00		53.528.567,00		54.887.122,00		56.280.157,00		58.218.446,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15		15	52.461.500,00	15	53.528.567,00	15	54.887.122,00	15	56.280.157,00	15	58.218.446,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.142.736.970,00		2.186.320.240,00		2.241.809.047,00		2.298.706.161,00		2.377.873.601,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan(Laporan)	3	3		3	8.824.170,00	3	9.003.654,00	3	9.232.166,00	3	9.466.479,00	3	9.792.504,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.682.170		8.824.170,00		9.003.654,00		9.232.166,00		9.466.479,00		9.792.504,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan(Laporan)	3	3		3	8.824.170,00	3	9.003.654,00	3	9.232.166,00	3	9.466.479,00	3	9.792.504,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.695.000		94.517.500,00		96.439.986,00		98.887.633,00		101.397.401,00		104.889.528,00		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Lembaga)	15	15		15	33.142.500,00	15	33.816.618,00	15	34.674.884,00	15	35.554.933,00	15	36.779.445,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.695.000		33.142.500,00		33.816.618,00		34.674.884,00		35.554.933,00		36.779.445,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Lembaga)	15	15		15	33.142.500,00	15	33.816.618,00	15	34.674.884,00	15	35.554.933,00	15	36.779.445,00		

Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat(Laporan)	2	2		2	61.375.000,00	2	62.623.368,00	2	64.212.749,00	2	65.842.468,00	2	68.110.083,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				37.784.000		61.375.000,00		62.623.368,00		64.212.749,00		65.842.468,00		68.110.083,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat(Laporan)	2	2		2	61.375.000,00	2	62.623.368,00	2	64.212.749,00	2	65.842.468,00	2	68.110.083,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				116.670.000		238.156.500,00		243.000.604,00		249.167.959,00		255.491.841,00		264.290.980,00	
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga(Keluarga)	30	30		30	238.156.500,00	30	243.000.604,00	30	249.167.959,00	30	255.491.841,00	30	264.290.980,00	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup(Keluarga)	80	80		80		80		80		80		80		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam(Keluarga)	40	40		40		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat(Keluarga)	80	80		80		80		80		80		80		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing(Keluarga)	40	40		40		40		40		40		40		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				62.910.000		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat(Keluarga)	80	80		80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				75.551.500		52.296.000,00		53.359.701,00		54.713.970,00		56.102.610,00		58.034.784,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga(Keluarga)	30	30		30	52.296.000,00	30	53.359.701,00	30	54.713.970,00	30	56.102.610,00	30	58.034.784,00	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				116.670.000		164.085.000,00		167.422.489,00		171.671.672,00		176.028.699,00		182.091.127,00	

7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				46.769.000		13.406.000,00		13.678.660,00		14.025.877,00		14.434.035,00		14.931.007,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	1	1	46.769.000	1	13.406.000,00	1	13.678.660,00	1	14.025.877,00	1	14.434.035,00	1	14.931.007,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.457.053.220		2.608.668.470,00		2.661.728.788,00		2.729.283.463,00		2.798.552.677,00		2.894.934.832,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan(Nilai)	185	185		191,5	474.755.670,00	191,5	484.412.202,00	192	496.706.562,00	192	509.312.995,00	192	526.853.735,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99.416.000		133.257.500,00		135.967.958,00		139.418.824,00		142.957.274,00		147.880.723,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa(Lembaga)	6	6		6	133.257.500,00	6	135.967.958,00	6	139.418.824,00	6	142.957.274,00	6	147.880.723,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Laporan)	15	15		15		15		15		15		15			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				54.128.500		80.796.000,00		82.439.391,00		84.531.702,00		86.677.117,00		89.662.277,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa(Lembaga)	6	6		6	80.796.000,00	6	82.439.391,00	6	84.531.702,00	6	86.677.117,00	6	89.662.277,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99.416.000		52.461.500,00		53.528.567,00		54.887.122,00		56.280.157,00		58.218.446,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Laporan)	15	15		15	52.461.500,00	15	53.528.567,00	15	54.887.122,00	15	56.280.157,00	15	58.218.446,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.142.736.970,00		2.186.320.240,00		2.241.809.047,00		2.298.706.161,00		2.377.873.601,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan(Laporan)	3	3		3	8.824.170,00	3	9.003.654,00	3	9.232.166,00	3	9.466.479,00	3	9.792.504,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.682.170		8.824.170,00		9.003.654,00		9.232.166,00		9.466.479,00		9.792.504,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan(Laporan)	3	3		3	8.824.170,00	3	9.003.654,00	3	9.232.166,00	3	9.466.479,00	3	9.792.504,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.695.000		94.517.500,00		96.439.986,00		98.887.633,00		101.397.401,00		104.889.528,00		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Lembaga)	15	15		15	33.142.500,00	15	33.816.618,00	15	34.674.884,00	15	35.554.933,00	15	36.779.445,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.695.000		33.142.500,00		33.816.618,00		34.674.884,00		35.554.933,00		36.779.445,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(Lembaga)	15	15		15	33.142.500,00	15	33.816.618,00	15	34.674.884,00	15	35.554.933,00	15	36.779.445,00		

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing(Keluarga)	40	40		40	164.085.000,00	40	167.422.489,00	40	171.671.672,00	40	176.028.699,00	40	182.091.127,00	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				41.560.000		13.897.500,00		14.180.175,00		14.540.068,00		14.909.095,00		15.422.564,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup(Keluarga)	80	80		80	13.897.500,00	80	14.180.175,00	80	14.540.068,00	80	14.909.095,00	80	15.422.564,00	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				8.928.250		7.878.000,00		8.038.239,00		8.242.249,00		8.451.437,00		8.742.505,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam(Keluarga)	40	40		40	7.878.000,00	40	8.038.239,00	40	8.242.249,00	40	8.451.437,00	40	8.742.505,00	
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana						-		-		-		-		-	
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan						-		-		-		-		-	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat kemantren Ngampilan (Kelurahan Ngampilan)						1.183.920.300,00		1.206.001.239,00		1.238.660.310,00		1.270.097.509,00		1.313.839.667,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.116.414.300		2.142.736.970,00		2.186.320.240,00		2.241.809.047,00		2.298.706.161,00		2.377.873.601,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Pokmas)	177	177		177	540.635.300,00	177	551.631.822,00	177	565.632.237,00	177	579.987.984,00	177	599.962.770,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				485.836.550		540.635.300,00		551.631.822,00		565.632.237,00		579.987.984,00		599.962.770,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Pokmas)	177	177		177	540.635.300,00	177	551.631.822,00	177	565.632.237,00	177	579.987.984,00	177	599.962.770,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Unit)	13	13		13	643.285.000,00	13	656.369.417,00	13	673.028.073,00	13	690.109.525,00	13	713.876.897,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				630.577.750		643.285.000,00		656.369.417,00		673.028.073,00		690.109.525,00		713.876.897,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Unit)	13	13		13	643.285.000,00	13	656.369.417,00	13	673.028.073,00	13	690.109.525,00	13	713.876.897,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Ngampilan (Kelurahan Notoprajan)						949.992.500,00		969.315.347,00		993.916.571,00		1.019.142.173,00		1.054.241.430,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				836.241.750		2.142.736.970,00		2.186.320.240,00		2.241.809.047,00		2.298.706.161,00		2.377.873.601,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Unit)	15	15		15	949.992.500,00	15	969.315.347,00	15	993.916.571,00	15	1.019.142.173,00	15	1.054.241.430,00	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Pokmas)	127	127		127		127		127		127		127		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				383.894.000		478.412.000,00		488.142.900,00		500.531.967,00		513.235.468,00		530.911.298,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Unit)	15	15		15	478.412.000,00	15	488.142.900,00	15	500.531.967,00	15	513.235.468,00	15	530.911.298,00	

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				452.347.750		471.580.500,00		481.172.447,00		493.384.604,00		505.906.705,00		523.330.132,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Pokmas)	127	127		127	471.580.500,00	127	481.172.447,00	127	493.384.604,00	127	505.906.705,00	127	523.330.132,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				129.690.250		108.750.250,00		110.962.158,00		113.778.584,00		116.871.728,00		120.896.253,00		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.(Prosentase)	100	100		100	108.750.250,00	100	110.962.158,00	100	113.778.584,00	100	116.871.728,00	100	120.896.253,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						108.750.250,00		110.962.158,00		113.778.584,00		116.871.728,00		120.896.253,00		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(Laporan)	8	8		8	108.750.250,00	8	110.962.158,00	8	113.778.584,00	8	116.871.728,00	8	120.896.253,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				129.690.250		108.750.250,00		110.962.158,00		113.778.584,00		116.871.728,00		120.896.253,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(Laporan)	8	8		8	108.750.250,00	8	110.962.158,00	8	113.778.584,00	8	116.871.728,00	8	120.896.253,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				34.140.250		30.878.000,00		31.506.038,00		32.305.720,00		33.183.972,00		34.326.675,00		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti(Prosentase)	100	100		100	30.878.000,00	100	31.506.038,00	100	32.305.720,00	100	33.183.972,00	100	34.326.675,00	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				34.140.250		30.878.000,00		31.506.038,00		32.305.720,00		33.183.972,00		34.326.675,00		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan(Dokumen)	12	12		12	30.878.000,00	12	31.506.038,00	12	32.305.720,00	12	33.183.972,00	12	34.326.675,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional(Orang)	30	30		30		30		30		30		30			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				9.240.250		7.358.000,00		7.507.841,00		7.698.244,00		7.951.958,00		8.225.671,00		

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional(Orang)	30	30		30	7.358.000,00	30	7.507.641,00	30	7.698.244,00	30	7.951.958,00	30	8.225.671,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24.900.000		23.520.000,00		23.998.397,00		24.607.476,00		25.232.014,00		26.101.004,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan(Dokumen)	12	12		12	23.520.000,00	12	23.998.397,00	12	24.607.476,00	12	25.232.014,00	12	26.101.004,00		

4.3 Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan ersih dari korupsi.
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni

c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
   c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
   d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
   e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	Program	Outcome	Kegiatan	Mendukung Program Prioritas
1	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Ngampilan	1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Penataan kelembagaan yang adaptif
			1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Penataan kelembagaan yang adaptif

NO.	Program	Outcome	Kegiatan	Mendukung Program Prioritas
2	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Posyandu paripurna
			1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Posyandu paripurna
			1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan	Posyandu paripurna
			1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan	Posyandu paripurna
			1.1.2.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Posyandu paripurna
			1.1.2.6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Posyandu paripurna
3	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Ngampilan	1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jogja Tangguh Bencana
4	1.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Ngampilan	1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional

			1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional
			1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Modernisasi Pasar Tradisional

4.4. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKU berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 tetap berlaku, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Kemantren Ngampilan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.4.01.2.22.06.0000 - Kemantren Ngampilan									
1,	Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan	Poin	524	525,6	525,76	525,84	525,92	526,08	526,16	
2,	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Poin	89,41 (A)	89,43 (A)	89,45 (A)	89,48 (A)	89,5 (A)	89,53 (A)	89,6 (A)	
3,	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Poin	405	407	407,2	407,3	407,4	407,6	407,7	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Ngampilan ini disusun Ngampilan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para stakeholder pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Ngampilan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Ngampilan.

******

LAMPIRAN:

1.Pohon Kinerja Kemanten Ngampila Tahun 2025 - 2029
2.Cascading Kemanten Ngampila Tahun 2025 - 2029
3.Data Kinerja Kemanten Ngampila Tahun 2025 - 2029

POHON KINERJA KEMANTEREN NGAMPILAN

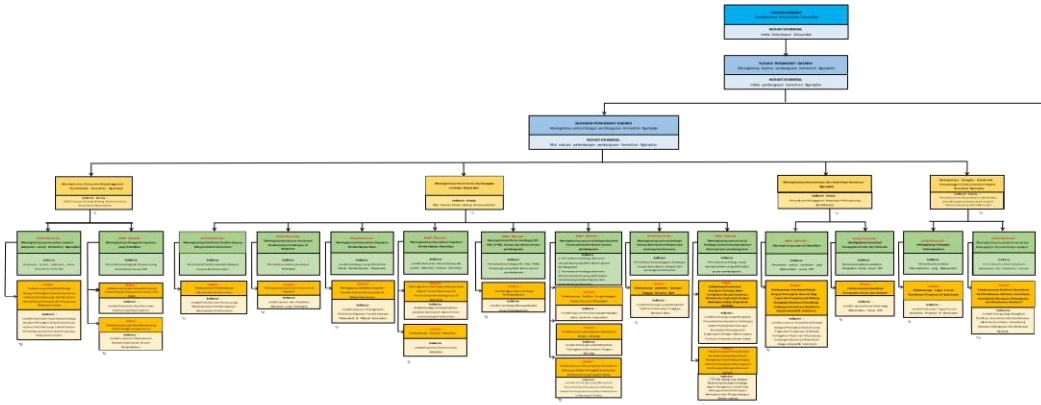

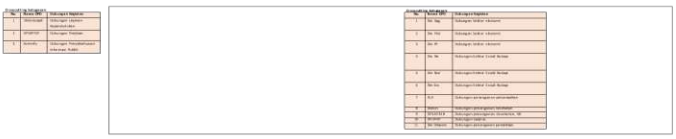

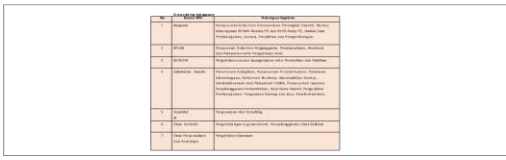

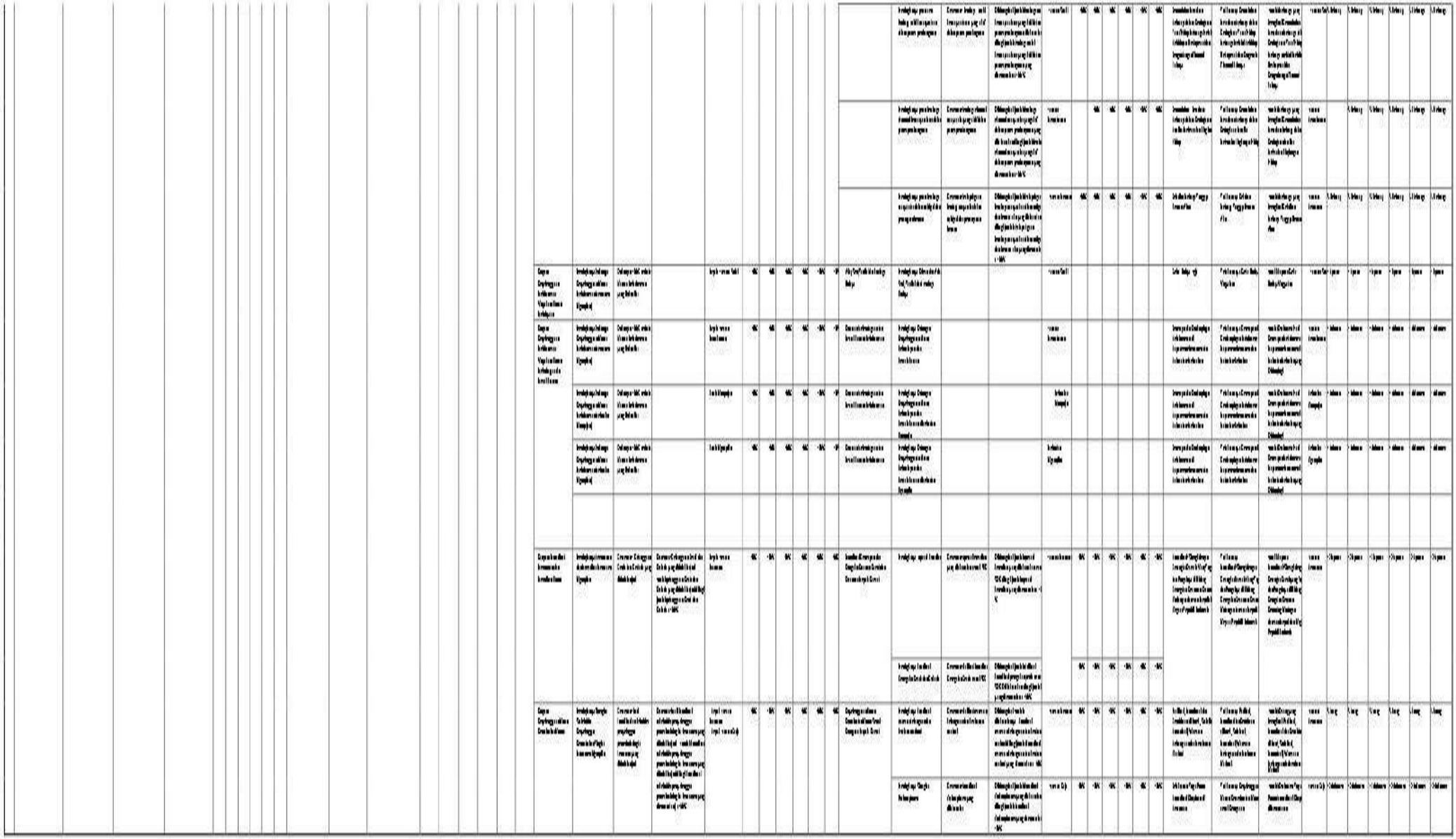

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Ngampilan	Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan dan pertumbuhan, kevitalisasian, dan kemajuannya yang dideskripsikan pada informasi evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUD 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evaluasi					50% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 50% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	324	325.6	325.76	325.84	325.92	326.08	326.08	326.16	☑	
						Sumber Data											
						50% Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren	poin	324	325.6	325.76	325.84	325.92	326.08	326.08	326.16	☑	
						Nilai evaluasi pertembangan pembangunan Kemantren ngampilan =Jumlah nilai pertembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan		400	407	407.2	407.3	407.4	407.5	407.6	407.7	☑	
						Jumlah nilai pertembangan pembangunan Kelurahan Notoprajan	Poin	404	406	406.2	406.3	406.4	406.5	406.6	406.7	☑	
						Jumlah nilai pertembangan pembangunan Kelurahan Ngampilan	Poin	406	408	408.2	408.3	408.4	408.5	408.6	408.7	☑	
						- 20% dari nilai Evaluasi Kinerja Kemantren	Poin	200	200	200	200	200	200	200	200	☑	
						- Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Ngampilan	Poin	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
			1.1 Meningkatnya pembentukan pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi pembentukan pembangunan Kemantren Ngampilan		Nilai evaluasi pertembangan pembangunan Kemantren Ngampilan =Jumlah nilai pertembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	400	407	407.2	407.3	407.4	407.5	407.6	407.7	☑	
						Jumlah nilai pertembangan pembangunan Kelurahan Notoprajan	Poin	404	406	406.2	406.3	406.4	406.5	406.6	406.7	☑	
						Jumlah nilai pertembangan pembangunan Kelurahan Ngampilan	Poin	406	408	408.2	408.3	408.4	408.5	408.6	408.7	☑	
						Jumlah kelurahan		2	2	2	2	2	2	2	2	☑	
			1.2. Meningkatnya Intelektifitas Pemantauan Kemantren Ngampilan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	penegakan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi (versi Pemerintah Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100): sangatbaik A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>25-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (89,423)	A (89,459)	A (89,539)	A (89,580)	A (89,100)	A (89,500)	A (89,510)	A (89,601)		
						Sumber Data										☑	
						Hasil penilaian RB Kemantren Ngampilan a 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dashlayan 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerin 3. Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Ase 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian penerapan Sistem Pengelolaan I 6. IP ASN Dandalpem 7. Penilaian Pengawasan oleh internal 8. Penilaian Indeks Penlayanan Terpadu	Nilai	A (89,423)	A (89,459)	A (89,539)	A (89,580)	A (89,100)	A (89,500)	A (89,510)	A (89,600)		

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN ANGGARAN 2025 s/d 2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi akhir	2030 Target	Perspektif	Catatan
1.1 Meningkatkan pelayanan sapta pesona kepada masyarakat Kecamatan Ngampilan	1.1.1 Program Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran Program: Terselenggaranya Pelayanan Kecamatan Ngampilan.	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	Poin	0.970	0.98	0.98	0.97	0.98	0.97	0.97	0.97	✓	
									Evaluasi Data											
									Prosentase Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	Poin	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	✓	
									Prosentase Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	Poin	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	✓	
									Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	✓	
					1.1.1 Koordinasi Pemerintahan, Pemuda dan Lomba Kelurahan Ciburan	Meningkatnya pemerintahan, pemuda dan lomba kelurahan Ciburan.	Persentase sarana prasarana umum yang terfasilitasi baik	Sarana prasarana umum yang terfasilitasi baik yang ada di kecamatan, kelurahan yang meliputi Balai Rw/rt, Balai pertemuan, Kantor Kelurahan, Kecamatan, Ngampilan. Kecamatan, kelurahan adalah instansi yang akan melakukan rehab, DPKP, MCK, Saluf, Trotoar, Talud, PJU, Gerbang, Gedung, dan lainnya.	Dihitung dari jumlah prasarana umum yang terfasilitasi baik / total sarpras x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	✓	
									Evaluasi Data											
									- Sarana prasarana umum terfasilitasi baik	unit	61	1.8	10	10	10	60	60	60	✓	
									Total target	unit	61	1.8	10	10	10	60	60	60	✓	
					1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	Meningkatnya Pelayanan Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pelayanan layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pelayanan layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pelayanan layanan yang terfasilitasi x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	✓	
									Evaluasi Data											
									- Jumlah pelayanan layanan yang terfasilitasi sesuai SOP			600							✓	
									- Jumlah pelayanan layanan yang terfasilitasi			600							✓	
	1.1.2 Program Pembinaan Ketentraman Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sasaran Program: Terlaksananya Pembinaan Ketentraman Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Ketentraman Masyarakat							Poin	101.00	102.50	101.50	101.50	102.00	102.00	102.00	✓	
									Evaluasi data											
									Prosentase Kinerja Bidang Ketentraman Masyarakat pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	Poin	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.97	0.97	0.97	✓	
									Prosentase Kinerja Bidang Ketentraman Masyarakat pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan	Poin	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.97	0.97	0.97	✓	
									Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	✓	
					1.2.1 Sosialisasi Regulasi Pendukung Desa	Meningkatnya Kesadaran Regulasi Pendukung Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Tentang Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	✓	
									Evaluasi data											
									Jumlah lembaga yang difasilitasi Hak Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	✓	
					1.2.2 Sosialisasi Pendukung Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Regulasi Pendukung Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Kasus yang Permasalahan		Jumlah Dokumen	dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	✓	
									Evaluasi data											
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	✓	
							- Jumlah Dokumen Musyawarah yang Dilaksanakan sesuai Tepat Waktu		Jumlah Dokumen	dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	✓	
									Evaluasi data											
									Jumlah Dokumen Musyawarah yang Dilaksanakan sesuai Tepat Waktu	dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	✓	
					1.2.3 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya upaya pencegahan Tawuran Berbasis Kelompok	Persentase upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok		Dihitung dari jumlah upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok yang dilaksanakan oleh Kelurahan dibagi jumlah upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	
									Sumber data :											
									jumlah upaya pencegahan tawuran yang dilaksanakan	unit	0.9	1.8	25	25	25	27	27	27	✓	
									jumlah upaya pencegahan tawuran yang direncanakan	unit	2.1	2.9	25	25	25	27	27	27	✓	terjadi 2 kali
						Meningkatnya fasilitasi pelatihan kerja masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pelatihankerja masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	1500%	1600%	1600%	1500%	1600%	1600%	1600%	1600%	✓	
									Evaluasi data											
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	kelompok	0.27	227	125	127	127	125	125	125	✓	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	kelompok	0.27	227	125	127	127	125	125	125	✓	
					1.2.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan Ngampilan	Meningkatnya upaya pencegahan Tawuran Berbasis Kelompok	Persentase upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok		Jumlah upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok yang dilaksanakan dibagi jumlah upaya pencegahan tawuran berbasis kelompok yang direncanakan x 100%	%	1500%	1600%	1600%	1500%	1600%	1600%	1600%	1600%	✓	
									Sumber data :											

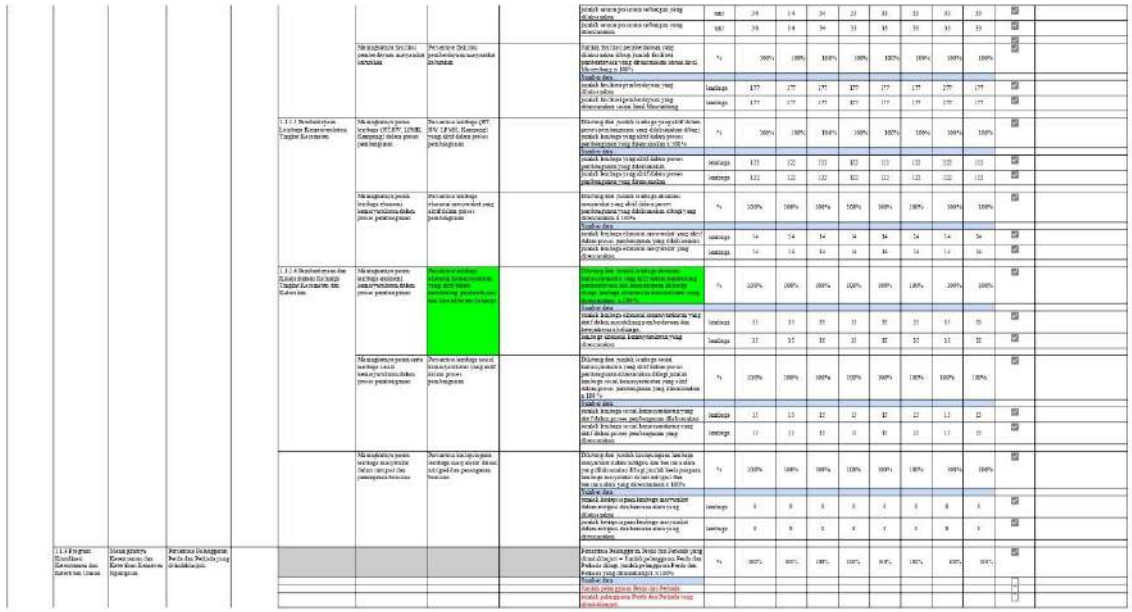

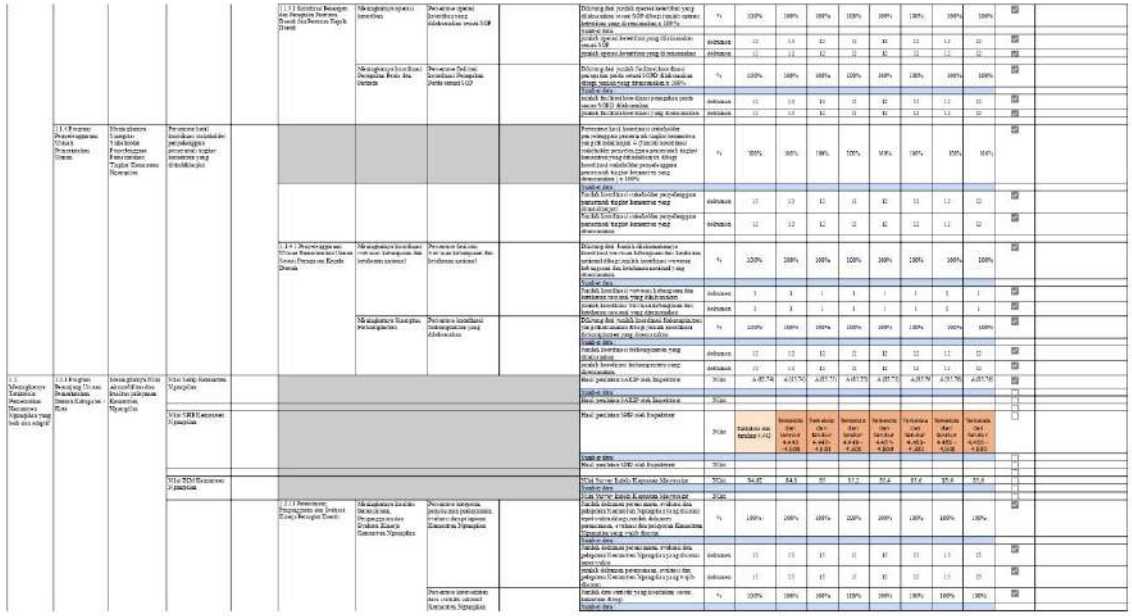

RENCANA STRATEGIS KEMANTREN WIROBRAJAN
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

KEMANTREN WIROBRAJAN

KOTA YOGYAKARTA

Jln. Bugisan Gang Dorodasih No.16 Kode Pos : 55251 Telp.(0274)375794

YOGYAKARTA

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4). Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Ditegaskan bahwa Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat , pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren..

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Yogyakarta yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta, maka Kemantren Wirobrajan menyusun perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang didasarkan pada usulan program kegiatan yang diusulkan tokoh masyarakat dan pelimpahan wewenang dari OPD teknis.

Renstra Kemantren Wirobrajan disusun sebagai suatu rencana strategis yang menjadi pedoman pemerintah Kemantren Wirobrajan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mewujudkan target kinerja untuk masa 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan faktor pendukung maupun faktor penghambat yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal Kemantren.

Renstra yang tersusun berisikan tentang program, kegiatan, input, output, outcome dan target pencapaian, baik untuk pencapaian tujuan dalam urusan administrasi perkantoran maupun program kegiatan kemasyarakatan.

Demikian, semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi pedoman Kemantren Wirobrajan untuk mencapai tujuan pembangunan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja Wirobrajan

SARWANTO, S.I.P.,M.M.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP 19720131 199803 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 8

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 16

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 17

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.2.2. Isu Strategis 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 22

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 24

3.2.Sasaran Pembangunan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 24

3.3.Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 35

3.4.Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029..... 40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41

4.1. Uraian Program 41

4.2. Uraian Kegiatan 43

4.3.Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 43

4.4.Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 49
4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 55
BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Tahun 2025	9
Tabel 2.2	Komposisi ASN Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3	Komposisi ASN Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Eselon Tahun 2025	9
Tabel 2.4	Komposisi PNS dan P3K Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan tahun 2025	10
Tabel 2.5	Komposisi Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	10
Tabel 2.6	Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Struktur Organisasi Tahun 2025	10
Tabel 2.7	Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan	11
Tabel 2.8	Evaluasi Renstra Periode Tahun 2020 – 2024	14
Tabel 2.9	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Wirobrajan	21
Tabel 3.1	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	22
Tabel 3.2	Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta	25
Tabel 3.3	Penahapan Rentra PD	35
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	40
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta	42
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta	48
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	51
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Kemantren Wirobrajan Pemerintah Kota Yogyakarta	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait	2
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	23
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan daerah kota tentang RPJMD Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali kota dan Wakil Walikota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3(tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah , penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Hubungan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

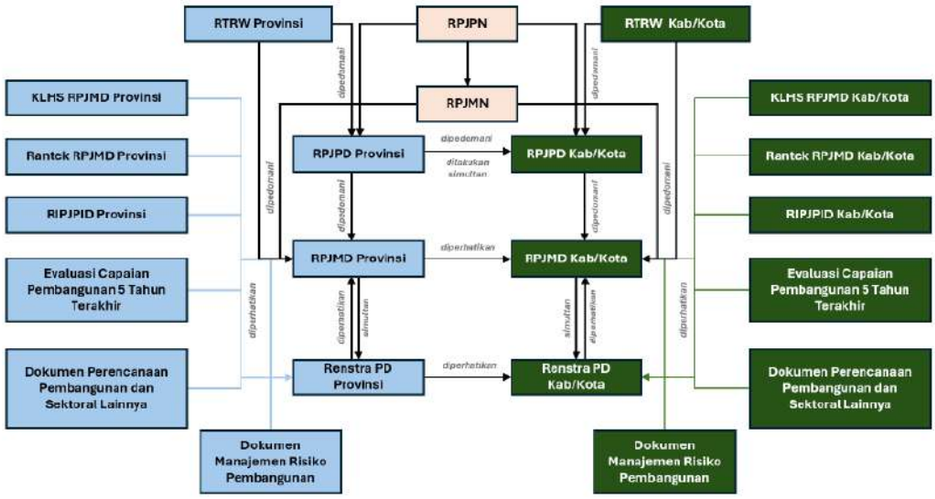

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program Walikota Yogyakarta. Renstra Kemantren Wirobrajan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Wirobrajan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kemantren Wirobrajan tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dari aspek urusan Pemerintahan Daerah. Renstra Kemantren Wirobrajan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Kemantren Wirobrajan;
2. Menetapkan program beserta indikator kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Wirobrajan tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kemantren Wirobrajan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2.Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota tahun 2025-2029;
- 3.3.Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4.Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan

Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program;

4.2. Uraian Kegiatan;

4.3.Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4.Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, yang dimaksud dengan Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dan penyebutan Mantri Anom adalah Sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren yang dipimpin oleh Lurah.

Ketugasan kemantren yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut kemantren mempunyai fungsi yaitu :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN

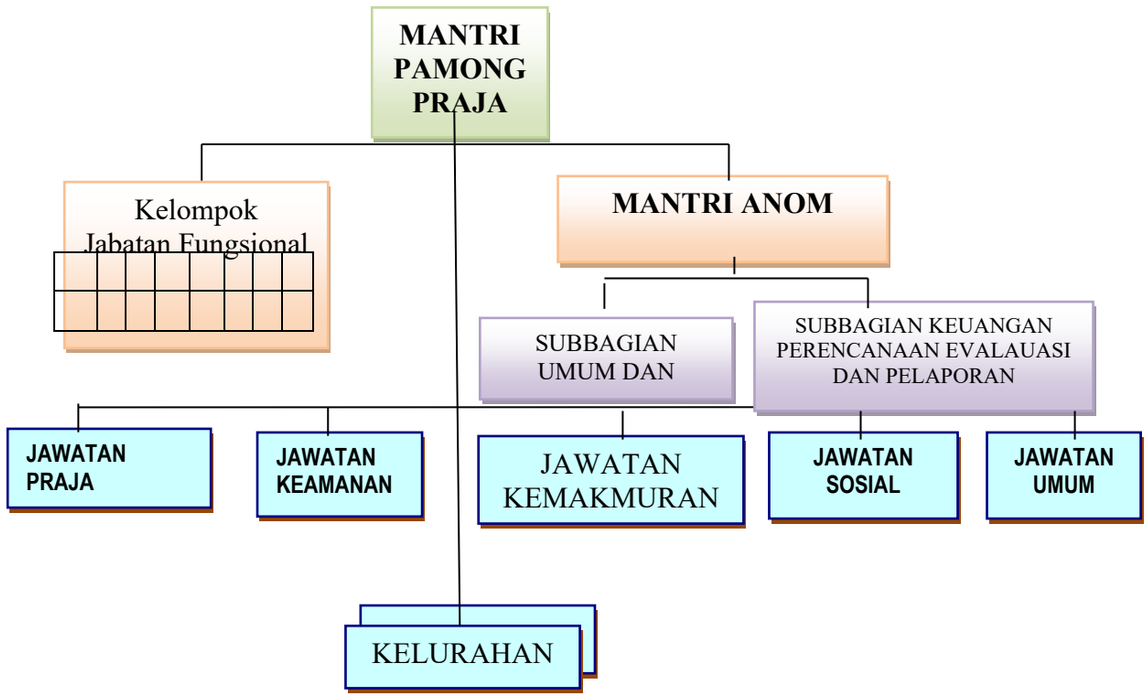

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023.

Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;
2. Mantri Anom, terdiri atas:
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan Umum; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

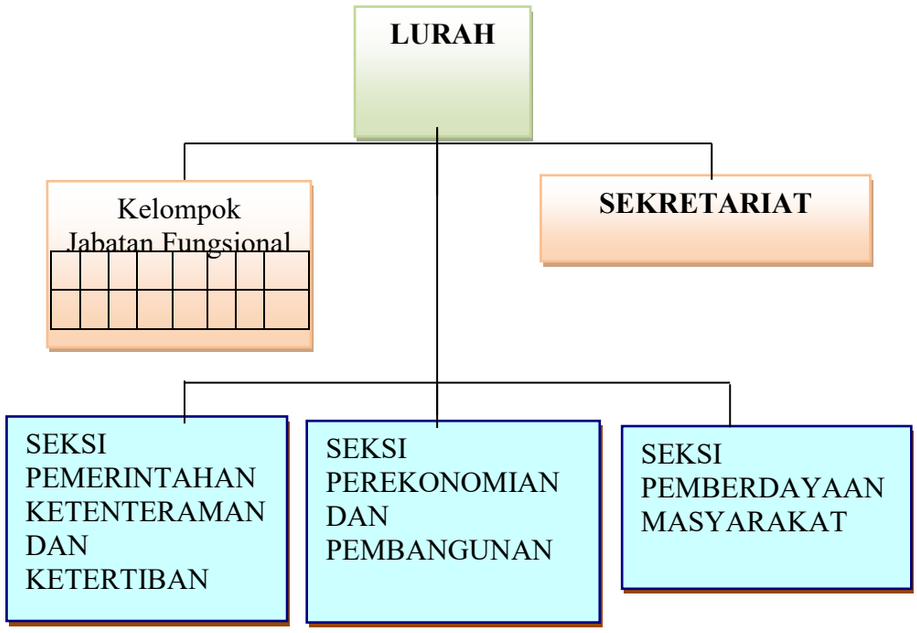

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

a. Lurah;
b. Sekretaris Lurah;
c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
f. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 46 orang, dengan rincian 32 orang PNS, 1 orang P3K dan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) sebanyak 13 orang.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan, jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Wirobrajan adalah 58 orang, dan saat ini baru terpenuhi 79,31 %. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan personil hasil analisis jabatan, namun demikian untuk jabatan struktural di Kemantren Wirobrajan semua telah terisi. Data mengenai komposisi pegawai Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah
PNS	
Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	1 orang
Mantri Anom Kemantren Wirobrajan	1 orang
Kepala Jawatan Praja	1 orang
Kepala Jawatan Keamanan	1 orang
Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang
Kepala Jawatan Sosial	1 orang
Kepala Jawatan Umum	1 orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
Lurah	3 orang
Sekrertaris Lurah	3 orang
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban	3 orang
Kasi Perekonomian dan Pembangunan	3 orang
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3 orang
Staf	8 orang
P3K	1 orang
Non PNS	13 orang
PJLOP	13 orang
TOTAL	**46 orang**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.2

Komposisi ASN Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Jumlah
IV	6 orang
III	21 orang
II	5 orang
I	- orang
PPPK	1 orang
TOTAL	**33 orang**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.3

Komposisi ASN Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Eselon Tahun 2025

Eselon	Jumlah
I	-
II	-
III	2 orang
IV	22 orang
Staf	9 orang
TOTAL	33 orang

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.4

Komposisi PNS dan P3K Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan tahun 2025

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	9 orang	27,27%
S1	15 orang	45,54%
D3	5 orang	15,63%
D2	-	-
SMA/SMK	4 orang	9,37%
SMP	-	-
SD	-	-
TOTAL	**33 orang**	**100%**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.5

Komposisi Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	-	-
S1	6 orang	33,33%
D3	1 orang	8,33 %
D2	-	-
SMA/SMK	5 orang	50 %
SMP	1 orang	8,33 %
SD	-	-
TOTAL	**13 orang**	**100%**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Struktur Organisasi Tahun 2025

Organisasi	Golongan				P3K	PJLOP	Jumlah
	IV	III	II	I			
Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	1						1 orang
Mantri Anom Kemantren Wirobrajan		1					1 orang
Kepala Jawatan Praja	1						1 orang
Kepala Jawatan Keamanan	1						1 orang
Kepala Jawatan Kemakmuran	1						1 orang
Kepala Jawatan Sosial		1					1 orang
Kepala Jawatan Umum	1						1 orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1					1 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		1					1 orang
Lurah	1	2					3 orang
Sekrertaris Lurah		3					3 orang
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban		3					3 orang

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan		3					3 orang
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		3					3 orang
Staf		3	5				8 orang
P3K					1		1 orang
Non PNS							
Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP)						13	13 orang
TOTAL	**6**	**21**	**5**	**-**	**1**	**13**	**46 orang**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Keadaan sarana dan prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Kemantren Wirobrajan masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang. Data sarana dan prasarana Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kemantren	Kel.PTP	Kel. WB	Kel. PKC	Jumlah
1.	Stationary Generating Set	1	-	1	-	2
2.	Pompa Air	1	-	-	1	2
3.	Station Wagon	1	-	-	-	1
4.	Pick Up	1	-	-	-	1
5.	Sepeda Motor	8	2	2	2	14
6.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	-	-	-	1
7.	Sepeda	-	1	1	2	4
8.	Gergaji Chain Saw	1	-	-	-	1
9.	Alat Ukur Universal	1	-	-	-	1
10.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1	1	1	4
11.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3	-	-	1	4
12.	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inci)	1	-	-	-	1
13.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	-	-	1	-	1
14.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	-	-	-	6
15.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	-	1
16.	Lemari Besi/Metal	15	2	1	-	18
17.	Lemari Kayu	4	4	5	-	13
18.	Rak Besi	5	-	2	1	8
19.	Rak Kayu	4	-	1	-	5
20.	Filing Cabinet Besi	14	3	7	2	26
21.	Lemari Kaca	6	1	2	1	10
22.	Alat Kantor Lainnya	2	1	4	-	7
23.	CCTV	3	2	1	2	8
24.	Papan Visual/Papan Nama	2	3	-	-	5
25.	White Board	7	1	3	-	11

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kemantren	Kel.PTP	Kel.WB	Kel.PKC	Jumlah
26.	Peta	1	1	1	1	4
27.	Alat Penghancur Kertas	1	-	-	-	1
28.	LCD Projector/Infocus	3	1	-	1	5
29.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-	1	-	1	2
30.	Papan Nama Instansi	1	1	1	-	3
31.	Meubelair	2	-	-	-	2
32.	Meja Kerja Besi/Metal	24	-	-	-	24
33.	Meja Kerja Kayu	1	3	12	-	16
34.	Sice	5	-	2	1	8
35.	Kursi kayu	10	-	-	-	10
36.	Meja Rapat	47	13	24	-	84
37.	Tempat Tidur Besi	2	-	-	-	2
38.	Meja Resepsionis	1	-	-	-	1
39.	Meja 1/2 Biro	18	2	2	9	31
40.	Kursi Rapat	10	-		6	16
41.	Meja Tambahan	2	-	-	-	2
42.	Meja Panjang	3	-	-	-	3
43.	Kursi Putar	10	-	5	3	18
44.	Bangku Tunggu	5	2	4	-	11
45.	Kursi Lipat	287	70	62	38	457
46.	Meja Komputer	7	1	2	1	11
47.	Alat Pengukur Waktu	4	-	-	-	4
48.	Jam Mekanis	3	1	1	1	6
49.	Jam Elektronik	2	2	-	-	4
50.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	-	-	1
51.	Mesin Pemotong Rumput	1	-	-	-	1
52.	Alat pendingin	5	-	-	-	5
53.	Lemari Es	1	-	-	-	1
54.	A.C Split	8	2	2	-	12
55.	Kipas Angin	9	4	-	1	14
56.	Exhause Fan	2	-	-	-	2
57.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	-	-	-	1
58.	Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	41	-	-	-	41
59.	Radio	1	-	1	-	2
60.	Televisi	7	1	-	1	9
61.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	-	-	-	2
62.	Amplifier	2	-	-	-	2
63.	Loudspeaker	2	-	-	-	2
64.	Sound System	5	2	1	1	9
65.	Wireless	3	2	3	3	11
66.	Megaphone	2	-	-	-	2
67.	Microphone	4	-	-	-	4
68.	Camera video	2	-	-	-	2
69.	Tangga Aluminium	2	1	1	1	5
70.	Dispenser	5	1	2	1	9
71.	P.C Unit	34	5	6	4	49
72.	Note Book	4	1	1	1	7
73.	Pesawat Telepon	16	-	1	1	18
74.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	7	7	5	41
75.	PERALATAN PERMAINAN	1	-	-	-	1
76.	Uninterupted Power Supply (UPS)	2	1	2	1	6
77.	Rambu Cermin	5	-	30	-	35
78.	Rambu Jalan	26	-	-	-	26
79.	Vertikal Blind	42	-	-	-	42
80.	Handy Talky (HT)	4	-	-	-	4
81.	Bracket Standing Peralatan	3	-	-	-	3
82.	Alat pemadam/portable	36	1	2	2	41
83.	Microphone Cable	2	2	2	2	8
84.	Monitor	1	-	1	-	2

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ketugasan Kemantren yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam Renstra Periode tahun 2023-2026 Kemantren Wirobrajan didukung dengan tujuan dan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan

Rata-rata realisasi kinerja masing-masing indikator mencapai diatas 100% sebagai mana tercantum di tabel 2.8 Evaluasi kinerja Tahun 2020 – tahun 2024.

Faktor mendorong tercapainya target indikator sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain komputer dan internet;
2. Adanya pemasangan mesin ADM di Kemantren Wirobrajan;
3. Adanya Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan di Kemantren Wirobrajan;
4. Adanya media sosial sebagai sarana untuk informasi dan sosialisasi (website, instagram, facebook);
5. Petugas pelayanan responsif, sopan, dan ramah dalam memberikan pelayanan kemantren;
6. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi.

Faktor penghambat antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengoperasionalkan layanan online;
2. Pelayanan perizinan pemakaman TPU Pracimalaya belum tersampaikan kepada masyarakat;
3. Belum maksimalnya tindak lanjut keberlangsungan dan pengembangan hasil pelatihan dan pemeliharaan sarpras dengan swadaya masyarakat

Upaya tindaklanjut sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada warga terkait pelayanan secara online (pengurusan adminduk dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Pendampingan cetak dokumen adminduk (KK, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian) melalui mesin ADM;
3. Sosialisasi pelayanan perizinan pemakaman TPU Pracimalaya baik secara online maupun offline;
4. Menumbuhkan swadaya masyarakat dan melakukan koordinasi dengan OPD

Tabel 2.8

Evaluasi kinerja Tahun 2020 – tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)										Prosentase (%)					Keterangan
					Target					Realisasi										
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobraja	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	372 poin	373 poin	377,33 poin	379 poin	379,66 poin	372 poin	377.33 poin	378,33 poin	379 poin	380 poin	100	101,16	100,26	100	100,08	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82,91 poin	82,99 poin	83,07 poin	83,27 poin	83,47 poin	82,95 poin	83,05 poin	83,20 poin	83,385 poin	83,602 poin	100,04	100,07	100,15	100,13	100,15	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	726.350.000 rupiah	933.300.000 rupiah	933.300.000 rupiah	980.585.000 rupiah	1.035.955.000 rupiah	809.330.000 rupiah	1.020.252.000 rupiah	980.585.000 rupiah	1.035.955.000 rupiah rupiah	1.037.215.000 rupiah	111,42	109,31	105,06	105,64	100,12	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)										Prosentase (%)					Keterangan
					Target					Realisasi										
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	60	43	42 Pelanggaran	42 Pelanggaran	-	43	42	58 Pelanggaran	36 Pelanggaran	-	128,33	102,38	61,90	114,28	Indikator baru digunakan di tahun 2021
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Wirobrajan) x 100%	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	Indikator baru digunakan di tahun 2023
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	A Nilai	A Nilai	-	-	-	AA Nilai (94,74 %)	A A Nilai (90,009)				100,43	100,01	Indikator baru digunakan di tahun 2023
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	-	-	-	A Nilai	A Nilai	-	-	-	A Nilai	A Nilai				100	100	Indikator baru digunakan di tahun 2023

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan fungsi pelayanan di Kemantren Wirobrajan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 19 tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Pasal 2 ayat 1. Dalam perwal tersebut Walikota Yogyakarta melimpahkan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Mantri Pamong Praja yang meliputi 14 urusan sebagai berikut :

a. Pemerintahan umum
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat FKDM dan FKP
b. Pendidikan
   Diwujudkan dalam bentuk dukungan pelaksanaan JBM
c. Kesehatan
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis Kewilayahan
d. Pekerjaan umum dan penataan ruang
   Antara lain:
   - Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan
   - Pemberian Izin tempat pemakaman umum, Kemantren Wirobrajan ada TPU makam Pracimalaya
   - Sosialisasi peraturan terkait penataan ruang dan perizinan
e. Ketenteraman, ketertiban umu dan perlindungan masyarakat
   Antara lain:
   - PRB (Pengurangan Risiko Bencana);
   - Pemeliharaan alat pemadam api ringan; dan
   - Pengadaan dan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (closed circuit television).
f. Sosial
   Diwujudkan dalam bentuk pembinaan bantuan sosial pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   Meliputi:
   - Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
   - Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja operasional posyandu;
   - Pelaksanaan program kegiatan gerakan sayang ibu; dan
   - Pelaksanaan program kegaitan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
h. Pertanahan
   Berupa mediasi awal terhadap permasalahan tanah yang terjadi di Kemantren antara lain:
   - Pemilik tanah persil dengan pemilik fasilitas umum; atau
   - Pemilik tanah persil dengan pemilik tanah persil lainnya.
i. Lingkungan hidup
   Meliputi:
   - Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan berupa taman, pohon perindang dan /atau pergola
   - Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan

- Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah
- Pengolahan sampah organik dengan cara : komposter drum, budi daya magot, eco enzyme, kerangjang takakura, ember tumpuk, lodong sisa dapur (losida), pengoposan dengan cacing, biopori jumbo atau lubang tabung air (biopori)

j. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meliputi:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelayanan e-mobile pembuatan KTP elektronik dan atau pelayanan mobile administrasi kependudukan di Kemantren
- Menyediakan fasilitas sarana prasarana pelayanan administrasi Kependudukan
- Menunjuk personil untuk membantu tugas pelayanan administrasi kependudukan

k. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Berupa fasilitasi koordinasi kegiatan kampung keluarga berkualitas

l. Perhubungan

Meliputi:

- Perencanaan dan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan di jalan Lingkungan
- Pengadaan cermin tikungan
- Pemeliharaan cermin tikungan

m. Kebudayaan

Meliputi:

- Penguatan kebudayaan di Kemantren dan pemberian fasilitasi organisasi kebudayaan yang ada di kemantren

n. Perdagangan

Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan melalui online single submission (OSS).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Belum optimalnya Pengelolaan sampah

- Belum optimalnya pengurangan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 3R mencakup mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang yang masih berguna, dan mendaur ulang sampah menjadi barang baru.
    - Reduce (mengurangi)

      Antara lain: **mengurangi konsumsi**: pilih produk dengan kemasan minimal atau yang bisa diisi ulang. Hindari penggunaan alat makan sekali pakai dan beli bahan makanan secukupnya**. Memilih produk ramah Lingkungan :** pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. **Mengurangi pemborosan** : periksa dokumen sebelum dicetak, gunakan email untuk berkirim surat dan hindari penggunaan kertas yang berlebihan.
    - Reuse (menggunakan ulang)

      Antara lain: **manfaatkan barang bekas:** gunakan kembali botol kaca atau plastik sebagai wadah penyimpanan, kertas bekas untuk

catatan, atau pakaian bekas untuk kain lap. **Gunakan barang bekas untuk fungsi lainnya:** misalnya gunakan botol galon untuk pot tanaman atau kaleng bekas untuk wadah penyimpanan. **Donasi barang yang masih berguna :**

- Recycle (mendaur ulang)
  Mendaur ulang sampah menjadi bahan baku baru dan pemanfaatan bahan baku tersebut untuk membuat produk baru.

- Masih Kurangnya kesadaran masyarakat memilah sampah.

Memilah sampah dari sumbernya adalah memisahkan jenis-jenis sampah di tempat sampah rumah tangga atau sumber lainnya (seperti sekolah, kantor, dll.) menjadi beberapa kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, terutama dalam proses daur ulang dan pengolahan menjadi produk baru atau pupuk kompos. Manfaat memilah sampah antara lain:

- **Memudahkan Daur Ulang:**
  Sampah yang sudah dipilah, terutama sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca, lebih mudah didaur ulang menjadi bahan baku baru atau produk lain.
- **Mempermudah Pengelolaan:**
  Pemilahan sampah memudahkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), dan mengoptimalkan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- **Mengurangi Pencemaran Lingkungan:**
  Dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, potensi pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat diminimalkan.
- **Menghemat Sumber Daya Alam:**
  Daur ulang sampah yang sudah dipilah dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru, seperti kayu, logam, dan minyak bumi.

Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah, termasuk pelarangan pembuangan sampah langsung ke depo oleh warga masyarakat dan mewajibkan penggunaan jasa penggerobak (transporter) di setiap RW. Selain itu, ada upaya desentralisasi pengelolaan sampah, dengan membangun beberapa lokasi penanganan sampah sementara seperti TPS 3R Nitikan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berfokus pada pengelolaan sampah harian dan memaksimalkan fungsi posko darurat serta menargetkan penutupan permanen TPS.

Bank sampah di Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bank sampah berperan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memberikan nilai ekonomis dari sampah yang dikelola, selain itu, bank sampah juga membantu menjaga kebersihan lingkungan.

b. Belum optimalnya program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Peserta pelatihan yang hadir sebagian besar orang yang sama padahal sudah dilaksanakan di sore hari (kurangnya kaderisasi kelembagaan);
- Kurang kesadaran mempratekkan hasil pelatihan karena terkendala dana, tempat, bahan baku;
- Belum maksimalnya tindak lanjut keberlangsungan dan pengembangan hasil pelatihan (prosentase tindak lanjut masih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta)
- Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan swadaya masyarakat masih kurang

c. **Upaya Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang belum optimal**

Kewenangan layanan kesehatan masyarakat yang dilimpahkan ke Kemantren adalah berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan berbasis Posyandu (Pos pelayanan terpadu) di masing-masing RW, edukasi maupun sosialisasi informasi kesehatan serta upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu permasalahan yang saat ini terdeteksi adalah banyak Balita di bawah dua tahun yang mengalami kelambanan pertumbuhan atau yang disebut *Stunting.* Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesehatan belum optimal karena penyebab dari kasus stunting ini ada beberapa hal yaitu faktor orangtua/ibu hamil yang beresiko , kondisi ekonomi sehingga anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup serta faktor pola asuh yang kurang tepat.

2.2.2. **Isu Strategis**

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Saat ini masalah sampah menjadi persoalan yang urgen karena keterbatasan lahan untuk tempat pembuanagn akhir sampah di Kota Yogyakarta. Daya tampung pengolahan dan pengangkutan sampah menjadi kendala sehingga warga masyarakat tidak dapat membuang sampah secara bebas ke depo terdekat. Akses warga untuk membuang sampah terbatas sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan banyak sampah liar dibuang oleh warga masyarakat. Hal ini menjadi keprihatinan karena tumpukan sampah yang tidak terangkut menjadi sumber pencemaran lingkungan dan kebersihan wilayah tidak dapat terwujud dengan baik.

b. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

- Kegiatan pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi warga untuk terus mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik.
- Peningkatan derajat hidup warga masyaraka dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sanitasi, sarana prasarana umum serta akses jalan pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman dan layak huni bagi warga masyarakat.
- Penanggulangan angka kemiskinan melalui skema "Gandeng Gendong" memberikan multiplyer efect karena dapat menggerakkan roda perekonomian di level bawah dan memberikan kesempaan berusaha bagi warga kurang

mampu. Selain itu program ini juga mampu merubah skema pasar karena dapat untuk mengoptimalkan belanja untuk kelompok UKM di wilayah.

c. Pengurangan Resiko Stunting

- "Segoro Bening" Semangat Gotong Royong Bebas Stunting
  Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam menanggulangi stunting dengan menggerakkan partisipasi Masyarakat, merangkul corporasi dan juga pegawai pemerintahan/ASN untuk turut serta mengurangi resiko stunting di wilayah. Gerakan ini berupa pengumpulan donasi dari pegawai/perangkat pemerintah, CSR dan dari warga Masyarakat berupa uang maupun bahan makanan tambahan bergizi/protein untuk diberikan kepada anak dan ibu hamil yang beresiko stunting.
- Peran serta stakeholder sangat berperan dalam mengurangi angka prevalensi stunting dengan mengkoordinir dan melaksanakan bantuan bahan makanan bergizi secara kosisten dan monitoring dengan penguatan kelembagaan menggerakkan kader, RT, RW, LPMK dan Kampung agar peduli dengan lingkungan masing-masing mencegah stunting.

Tabel 2.9

Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Wirobrajan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bidang Kesehatan	- Upaya Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang belum optimal	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	Tumbuh Kembang Anak	Masalah Gizi kronis	Penanganan Stunting	- Pengurangan Resiko Stunting
Bidang Sosial	- Belum optimalnya program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	Kemiskinan dan ketimpangan	Pendapatan perkapita dibawah rata-rata	Angka Kemiskinan meningkat	- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Lingkungan Hidup	- Belum optimalnya Pengelolaan sampah	Pengelolaan persampahan yang belum optimal	Perubahan iklim	Pencemaran lingkungan	Kondisi darurat sampah	- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta sebagai beriku:

Tabel 3.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan 2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya local 4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD1945 5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	T1.Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	T2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	S3. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
		S4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
		S5. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
		S6. Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib
	T3. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	S7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Berikut Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

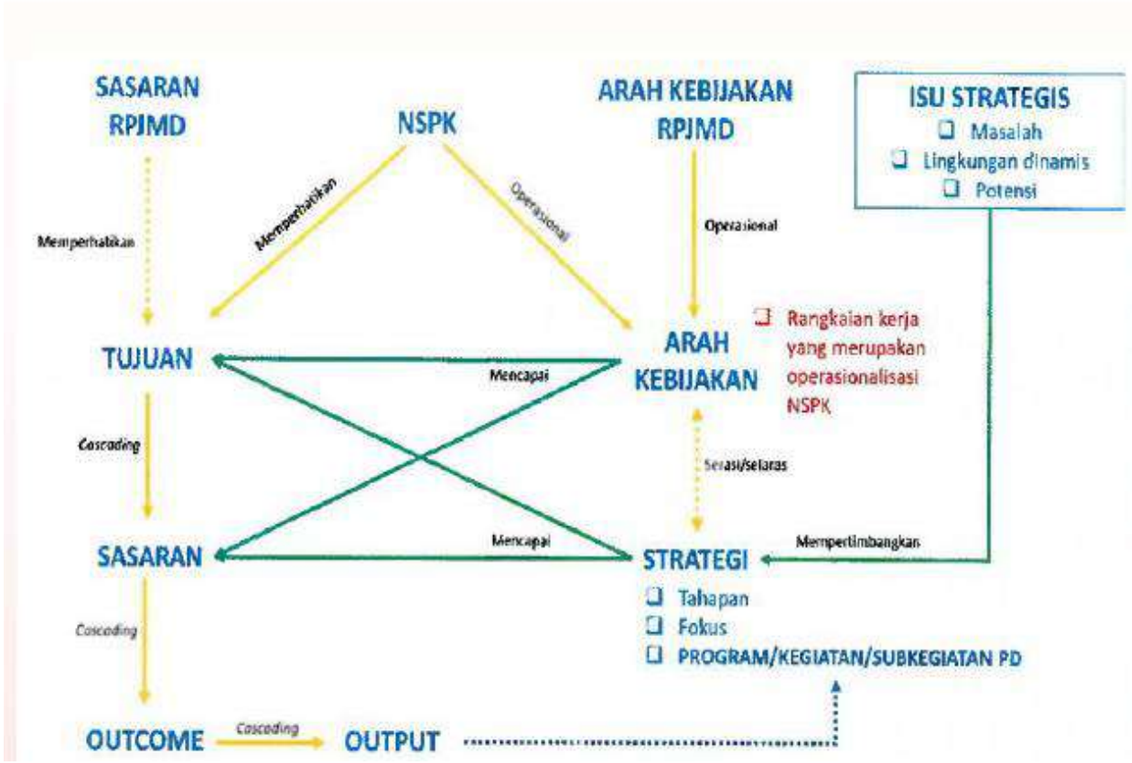

Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

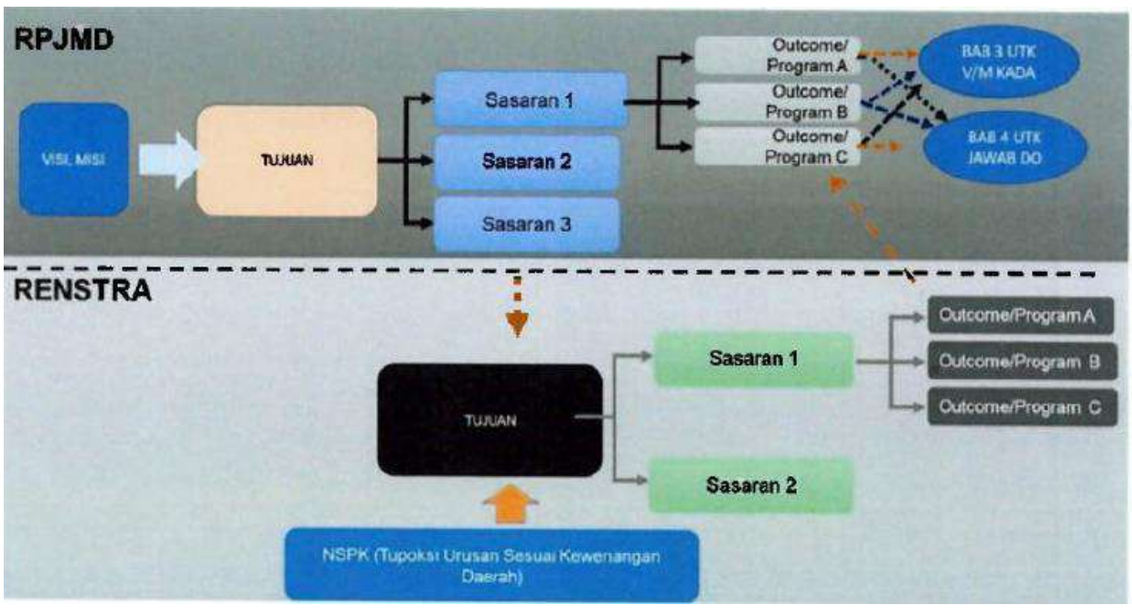

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kemantren Wirobrajan akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan **1**. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan**.**

- Indikator kinerja: Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan.
- Formula Perhitungan: 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.
- Tujuan Kemantren Wirobrajan mendukung tujuan Pemerintah Kota ke-2 yaitu "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan".
- Mendukung Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta ke-4 yaitu "Meningkatnya keberdayaan masyarakat".

3.2. Sasaran Pembangunan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029

Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan
   - Indikator kinerja : Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan;
   - Formula Perhitungan: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan =Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan

5. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif
   - Indikator kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan;
   - Formula Perhitungan: Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Adapun Teknik Merumuskan tujuan san Sasaran Renstra PD sebagai berikut:

TABEL 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan		Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan (Poin)	497,2	497,46	497,73	498	498,26	498,53	498,8	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan (Poin)	380	380,33	380,66	381	381,33	381,66	382	
		Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan (Nilai)	AA (90,009)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	

Crosscutting ketugasan di Kemantren Wirobrajan sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   - Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan
   - Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan
   - Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

     a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Dindukcapil)
     Dukungan layanan Kependudukan di Kemantren Wirobrajan.

     b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
     Dukungan Layanan perijinan di Kemantren Wirobrajan

     c. Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Persandian (Dinas Kominfosandi)
     Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Wirobrajan. Berikut adalah beberapa peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Persandian bagi Kemantren Wirobrajan :
     - Pengembangan Sistem Informasi dan digitalisasi
     - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian membantu menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan pengelolaan informasi serta dalam pelaksanaan manajemen kewilayahan dan manajemen perkantoran. Selama ini kebutuhan terkait pemanfaatan perangkat IT baik hardware maupun software yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di wilayah telah tersedia dengan baik antara lain aplikasi JSS yang mewadahi hampir semua sarana IT yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masyarakat.
     - Penguatan Infrastruktur TIK di wilayah Kemantren Wirobrajan
       Dinkominfo bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur TIK di wilayah Kemantren Wirobrajan baik jaringan komunikasi dan koneksi internet yang handal, sehingga serta penyediaan perangkat CCTV di wilayah untuk mendukung operasional dan konektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar lebih optimal.
     - Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK
       Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian turut serta mendukung program pemberdayaan masyarakat Kemantern Wirobrajan dengan pemanfaatan TIK untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, misalnya dengan menyediakan aplikasi atau platform digital untuk pelaporan dan pemantauan proyek infrastruktur, menyediakan layanan-layanan publik secara digital, termasuk pelayanan perizinan, informasi publik, dan layanan elektronik lainnya terkait pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara onlline.
     - Pengelolaan Media Sosial dan Website
       Untuk menjamin keterbukaan informasi publik di kemantren Wirobrajan, Dinkominfosan memiliki peran dalam memberikan akses media sosial dan website resmi untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, menyampaikan informasi tentang program kegiatan yang

dilaksanakan di kemantren Wirobrajan dan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat, selain itu juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan.

- Pengamanan dan Perlindungan Data

  Dinkominfosan berperan atas pengamanan dan perlindungan data dan informasi yang dikelola oleh Kemantren Wirobrajan

d. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP)

Dukungan layanan TPU (Tempat Pemakaman Umum Pracimalaya di Kemantren Wirobrajan.

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- Sasaran Program: Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

a. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Wirobrajan.

b. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Wirobrajan

c. Dinas Pertanian & Pangan Kota Yogyakarta

Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Wirobrajan

d. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Dukungan Sektor Sosial Budaya di Kemantren Wirobrajan

e. **Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta**

Dukungan Sektor Sosial Budaya di Kemantren Wirobrajan

f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dukungan sektor Sosial Budaya kemantren Wirobrajan

g. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

- Masalah Persampahan

  Dalam mewujudkan kebersihan wilayah maka Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk mengkondisikan agar sampah di depo-depo sampah bisa terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

  Kewajiban Kemantren kelurahan dalam penanganan sampah adalah mengkondisikan warga masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, menggerakkan Bank Sampah agar optimal dan memastikan transporter bekerja sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin bahwa semua rumah tangga sudah berlangganan ke penggerobak.

- Pemeliharaan taman

  DLH berperan untuk menjamin bahwa taman-taman kota yang ada di sepanjang jalan arteri dan Runag Terbuka Hijau Publik (RTHP) selalu terpelihara. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk melakukan pemeliharaan/ pemangkasan pohon-pohon di ruang publik yang mengganggu lingkungan sekitar.

h. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

- Dinas Kesehatan berperan memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat dan memberikan informasi berkaitan dengan pencegahan dan peanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
- Sedangkan peran Kemantren dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat adalah dengan membangun sarpras dan lingkungan yang bersih, membangun MCK yang representatif, melakukan sosialisasi tentang kesehatan jiwa, pola hidup sehata dan pola makanan sehat bagi masyarakat.

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta memiliki peranan sebagai leading sektor beberapa program pemberdayaan di wilayah, adapaun irisan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- Penyelenggaraan dan pembinaan Posyandu

  Keberadaan lembaga Posyandu saat ini mulai ditingkatkan peranannya, untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dibawah koordinasi kemantren dan juga Puskesmas melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita, Ibu Hamil dan lansia di masing-masing RW.

  Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berperan untuk mengembangkan lembaga ini menjadi 6 SPM seperti amanat peraturan tentang posyandu dan memfasilitasi agar posyandu 6 SPM dapat berjalan optimal di wilayah.

  Tanggung jawab Kemantren adalah memastikan bahwa posyandu dimasing-masing RW dapat terus berjalan.
- DP3AP2KB membentuk Satgas Sigrak dan Mitra keluarga untuk membantu mengantisipasi dan menangani kasus di wilayah berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga , permasalahan tumbuh kembang anak dan permasalahan perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan.
- Penanganan masalah stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta bertanggungjawab untuk melaksanakan program penanganan stunting dan pengurangan resiko stunting di wilayah.

  Sedangkan ketugasan kemantren dan puskesmas adalah menyiapkan data sasaran melakukan pemantauan perkembangan dan melakukan sosialisasi agar angka stunting semakin menurun.

j. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan mitra Kemantren dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana

maupun infrastruktur wilayah, dapun pembagian peranannya sebagai berikut :

- Pembangunan skala besar /bangunan berstruktur menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan pemeliharaan gedung bangunan yang tidak merubah struktur menjadi kewenangan kemantren.
- Pemeliharaan jalan lingkungan

  Jalan kampung yang tidak beraspal menjadi kewenangan Kemantren sedangkan untuk jalan yang beraspal dan bernomor ruas jalan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Lampu PJU Kampung

  Untuk pemasangan tiang lampu PJU menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan ketugasan Kemantren/kelurahan adalah melakukan pemeliharaan PJU Kampung dengan penggantian lampu dan penggantian MCB.

k. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta

Dukungan penanganan Pendidikan di Kemantren Wirobrajan

l. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

- Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan membina lembaga – lembaga sosial masyarakat seperti LPMK, Kampung, RT dan RW.
- Memberikan arahan kepada Kemantren dalam pelaksanaaan ketugasan kewilayahan.
- Mengkoordinasikan permasalahan kewilayahan.
- Membina dan menetapkan batas-batas wilayah Kemantren dan kelurahan serta mengkoordinasikan penggabungan dan pemekaran wilayah RT.

3. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- Sasaran Program: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan
- Indikator Kinerja: Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP)

Dukungan Penegakan Perda (operasi penertiban PKL, Pondokan, spanduk dan vandalisme)

b. Polisi Sektor di Kemantren Wirobrajan

Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Wirobrajan

c. Koramil di Kemantren Wirobrajan

Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Wirobrajan

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   - Sasaran Program: Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan.
   - Indikator Kinerja : Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti.
   - Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

   a. Polisi Sektor di Kemantren Wirobrajan

   Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Wirobrajan

   b. Koramil di Kemantren Wirobrajan

   Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Wirobrajan

   c. Puskesmas di Kemantren Wirobrajan

   Dukungan peningkatan Kesehatan Masyarakat di kemantren Wirobrajan

   d. KUA di kemantren Wirobrajan

   Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama

   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

   Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Wirobrajan, adapun irisan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut :

   - Pemetaan Risiko Bencana dan mitigasi bencana

     Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemetaan risiko bencana di wilayahnya, berupa identifikasi daerah rawan bencana dan potensi kebencanaan, termasuk juga di wilayah Kemantren Wirobrajan.
   - Membentuk Kampung Tangguh Bencana di wilayah

     untuk mengantisipasi kebencanaan di wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membentuk dan melatih KTB agar dapat menangani evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memberikan fasilitasi peralatan untuk penanganan kebencanaaan skala ringan kepada KTB.
   - Pemulihan dan Rehabilitasi pasca bencana

     Dalam hal terjadi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan bantuan logistik berupa makakan, obat-obatan dan sarana lain yang diperlukan warga korban bencana.

   f. Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Yogaykarta

   Dukungan peningkatan antisipasi Kebakaran di Kemantren Wirobrajan.

   g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

   Dukungan peningkatan Wawasan kebangsaan.

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   - Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Wirobrajan
   - Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan, Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan, Nilai IKM Kemantren Wirobrajan
   - Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam mendukung dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan di Kemantren Wirobrajan dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah.

- Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Rencana Stategis (Renstra) Kemantaren Wirobrajan:

  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam memberikan arah kebijakan pembangunan di Kemantren Wirobrajan dengan menetapkan sasaran stategis yang harus diwujudkan di tingkat Kemantren dan memetapkan program kegiatan yang dilaksanakan, agar selaras dengan sasaran dan arah pembangunan kota Yogyakarta.

- Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan mengkoordinasikan penyusunan RKPD Kemantren Wirobrajan yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasasikan agar perencanaan pembangunan di wilayah bisa di support oleh OPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD.

  Sehingga Kemantren Wirobrajan fokus pada program kegiatan yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada kemantren, dan untuk yang di luar kewenangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan untuk mengkoordinasikan agar dilaksanakan oleh OPD teknis.

- Evaluasi Program/ kegiatan Kemantren

  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan di Kemantren Wirobrajan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi output dan outcome yang dihasilkan. Bappeda juga menganalisa efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target program yang ditetapkan.

- Pengembangan Kebijakan dan Regulasi untuk Kemantren

  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan pembangunan Infrastruktur, bidang ekonomi maupun sosial di wilayah Kemantren, dengan membuat kajian tematik roadmap pengembangan kawasan khususnya untuk kemantren.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung kinerja Kemantren Wirobrajan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien. Berikut adalah irisan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas di kemantren Wirobrajan :

- Penyusunan perencanaan anggaran Kemantren dan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa serta barang milik daerah.

  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini TAPD membantu dalam penyusunan rencana anggaran tahunan Kemantren agar perencanaan penganggaran dapat memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

- Membina dan mendampingi Kemantren Wirobrajan dalam proses pengelolaan/pelaksanaan anggaran.
- Memberikan fasilitasi berupa kebijakan dan perangkat lunak/software untuk pengelolaan keuangan berbasis IT. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu membuat kebijakan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di Kemantren Wirobrajan melalui Sisdur Pengelolaan Keuangan, Surat Edaran dan juga kebijakan-kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan anggaran Kemantren.

  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memfasilitasi dengan sistem keuangan yang berlaku secara nasional dalam pelaksanaan anggaran agar semua transaksi dapat termonitor oleh pusat serta menjamin akuntabilitas keuangan daerah.
- Memberikan pendampingan dan memonitor penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pengelolaan manajemen aset daerah. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu mengarahkan Kemantren Wirobrajan agar dalam pencatatan aset di Kemantren Wirobrajan dapat berjalan dengan baik dan selalu sinkron untuk setiap bulannya dengan adanya rekonsiliasi aset yang dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mendorong agar pemeliharaan dan pemanfaatan aset bisa dilaksanakan secara efisien.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui TAPD membantu memastikan bahwa kebutuhan Kemantren Wirobrajan dalam melaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

c. Inspektorat Kota Yogyakarta

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program/kegiatan yang dilaksanakan Kemantren Wirobrajan. Berikut adalah beberapa crosscutting Inspektorat Kota Yogyakarta dengan Kemantren Wirobrajan:

- Audit Kinerja: Inspektorat melakukan pembinaan dan audit terhadap kinerja Kemantren Wirobrajan secara berkala untuk memastikan bahwa Kemantren Wirobrajan telah melaksanakan kinerja organisasi secara optimal.

  Inspektorat kota Yogyakarta mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan Keuangan: Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemantren Wirobrajan untuk memastikan keakuratan kecukupan, dan kepatuhan terhadap prosedur penatausahaan anggaran. Dan Inspektorat berperan untuk mengendalikan agar tidak terjadi praktik korupsi , markup anggaran dan gratifikasi di lingkungan Kemantren Wirobrajan.
- Pengawasan Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa:

  Inspektorat berperan memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Kemantren Wirobrajan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan proses pengadaan yang tepat dan dilaksanakan dengan Pejabat Pengadaan dari Bagian Pengadaan Baranag dan jasa yang telah ditunjuk. Dengan peran ini diharapkan Kemantren Wirobrajan dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga.

- Pengawasan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum wilayah

  Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik wilayah yang dilaksanakan oleh Kemantren, termasuk pengecekan kualitas material yang digunakan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian dengan rencana dan spesifikasi teknis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pekerjaan fisik wilayah hasil bagus dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi anggaran dan kualitas pekerjaan.

  Dengan demikian Inspektorat kota Yogyakarta berperan dalam menjaga agar Kemantren Wirobrajan menjalankan tugasnya secara efektif,efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Kemantren Wirobrajan dalam pelaksanaaan pengadaan barang/jasa. Berikut adalah beberapa irisan ketugasan yang saling mendukung dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kemantren Wirobrajan.

- Penyusunan Rencana Pengadaan

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa yang ada di Kemantren Wirobrajan. Kebijakan yang diterapkan di Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa proses pengadaan barang/jasa harus dengan Pejabat Pengadaan yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dengan kebijakan ini semua jenis pengadaan selalu dikomunikasikan dengan pejabat pengadaan terkait. Dengan demikian maka semua jenis pengadaan akan terpantau dan terencana dengan baik termasuk perencanaan waktu, anggaran, dan spesifikasi teknis.

- Pengumuman dan Pemilihan Penyedia

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui pejabat pengadaan membantu Kemantren Wirobrajan untuk melakukan pengumuman pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- Penyusunan Kontrak

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan kontrak antara Kemantren Wirobrajan dengan penyedia barang/jasa yang terpilih, termasuk pengaturan mengenai jangka waktu, pembayaran dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

- Pengawasan Pelaksanaan Kontrak dan pembinaan teknis

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa, termasuk memastikan bahwa barang/jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak

e. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Wirobrajan, adapun irisan peranan Bagian organisasi adalah :

- Melakukan pemetaan analisa jabatan dan beban kerja masing-masing jabatan di Kemantren Wirobrajan, hal ini berkaitan dengan jumlah personil di masing-masing jabatan dan standar kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan sehingga SDM yang ditempatkan dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan target organisasi.

- Bagian Organisasi juga berperan untuk menganalisa dan melakukan kajian struktur organisasi Kemantren dan kelurahan yang efektif dan efisien bagi Kemantren Wirobrajan agar optimal dalam memberikan pelayanan publik.
- Dukungan penyusunan Perjanjian Kinerja, LKIP, mengatur Tata Naskah Dinas, mengatur Pakaian Dinas.

f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki irisan peran dalam mewujudkan capaian reformasi biroktasi di Kemantren Wirobrajan yaitu pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Kemantren Wirobrajan. Dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Kearsipan diharapkan Kemantren Wirobrajan mampu menyelenggrakan penataan dan pemeliharaan arsip statis maupun arsip dinamis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

g. Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Persandian (Dinas Kominfosandi)

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Wirobrajan. Berikut adalah beberapa peran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian bagi Kemantren Wirobrajan :

- Pengembangan Aplikasi dan Solusi Teknologi

  Selama ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian mensuport pelaksanaan ketugasan Kemantren Wirobrajan dengan selalu mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung kegiatan operasional Kemantren Wirobrajan, seperti SIMONEVA, SIMPEG, SIM Pelayanan dsb.

  Dengan memainkan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian membantu memastikan bahwa Kemantren Wirobrajan dapat memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dukungan penilaian Indeks Pembangunan Statistis Kemantren Wirobrajan

h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta (BKPSDM) memiliki peran yang penting dalam mendukung Kemanatren Wirobrajan dalam penberdayaan dan pengelolaan SDM yang berkualitas dan berintegritas.

Berikut adalah beberapa irisan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mensupport ketugasan Kemantren Wirobrajan :

a. Penyediaan Sumber Daya manusia melalui pengadaan dan penempatan personil sesuai Anjab Kemantren Wirobrajan.

   Penempatan personil yang sesuai dengan kompetensi jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kewilayahan, dengan personil yang kompeten maka Kemantren Wirobrajan dapat melaksakan tugas secara optimal.

b. Pengembangan SDM

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan maupun bimtek baik secra adaring maupun luring, hal ini untuk dapat meningkatkan wawasan pegawai baik yang bersifat teknis maupun manajerial guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

c. Evaluasi Kinerja Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di kemantren Wirobrajan.

d. Penyusunan Kebijakan Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan memberikan kebijakan kepegawaian yang berlaku di Kemantren Wirobrajan antara lain kebijakan terkait promosi, mutasi, penghargaan, dan sanksi bagi pegawai, serta sistem insentif kinerja.

e. Pembinaan Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membantu Kemantren Wirobrajan dalam pembinaan karier maupun dalam penganganan kasus/ permasalahan kepegawaian melalui pendampingan konseling maupun pembinaan administratif dan sanksi.

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 3.3

Penahapan Rentra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Berikut ini adalah penjelasan langkah langkah yang akan dilakukan Kemantren Wirobrajan dalam masing-masing tahap **:**

1. Tahap I Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

a. Strategi Penguatan dasar Pembangunan

Dalam tahap ini Kemantren Wirobrajan fokus pada penguatan pondasi yang menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan di tingkat kemantren yaitu :

- Data dan Informasi

  Membangun basis data pembangunan yang mutakhir (profil kemantren, data aset, potensi wilayah, data kemiskinan, UMKM, dan infrastruktur). Serta melakukan integrasi data lintas kelurahan untuk memudahkan perencanaan.

- Regulasi dan Perencanaan

Menyusun dokumen perencanaan (Renja, RKPD,DPA) yang selaras dengan RPJMD Kota. Dan memastikan konsistensi program dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan musrenbang.

- Sarana dan Prasarana

  Penguatan fasilitas pelayanan publik antara lain kantor Kemantren & kelurahan, sarana pelayanan administrasi, sarana digital, dan peningkatan akses infrastruktur dasar wilayah (jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi fasum wilayah).

b. **Strategi Penguatan Kapasitas Pembangunan**

Strategi ini berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan :

- Kapasitas Aparatur Kecamatan

  Kemantren Wirobrajan akan selalu meningkatan kompetensi ASN melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan perencanaan, keuangan, pelayanan publik, dan digitalisas yang diselenggarakan oleh OPD teknis. Selain itu juga menerapkan budaya *Knowledge Management System* yaitu budaya untuk berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuan ke sesama rekan kerja. Dalam pengembangan kapasitas ini juga akan berfokus pada penguatan budaya kerja akuntabel, responsif dan kolaboratif sehingga mampu membangun jejaring kerja secara luas.
- Kapasitas Partisipasi Masyarakat

  Dalam proses ini Kemantren akan mendorong partisipasi aktif warga melalui forum musrenbang, rembuk warga, dan forum komunikasi, agar kelembagaan yang ada di wilayah mampu untuk mengembangkan diri dan bertransformasi positif menghadapi dinamika pembangunan wilayah.
- **Pemanfaatan Teknologi Digital**

  Kemantren Wirobrajan akan menerapan sistem informasi pembangunan berbasis web/aplikasi untuk monitoring program dan melakukan penguatan layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam administrasi kependudukan dan pengaduan.

c. **Strategi Kolaborasi dan Sinergi**

- Koordinasi Lintas Sektor

  Memperkuat peran kemantren sebagai simpul koordinasi antara perangkat daerah, kelurahan, dan lembaga masyarakat.
- Kemitraan Pembangunan

  Membangun kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam program pembangunan.
- Pendekatan Inklusif

  Melibatkan kelompok rentan (perempuan, lansia, difabel, anak) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

d. Strategi Monitoring dan Evaluasi

- Menyusun indikator kinerja pembangunan tingkat kemantren.
- Melaksanakan evaluasi program secara periodik dan terbuka.
- Mendorong transparansi melalui publikasi capaian pembangunan kepada masyarakat.

2. Tahap II Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

a. Penguatan Aksesibilitas Layanan Publik

- Digitalisasi Layanan**:**

  Pada tahap ini Kemantren Wirobrajan akan mengoptimalkan layanan administrasi dan perizinan berbasis online, dan mengoptimalkan layanan pengaduan digital yang mudah diakses warga.

- Penyebaran Informasi Layanan dan informasi publik lainnya:

  Kemantren Wirobrajan akan memperkuat dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan melakukan penyebaran informasi secara luas terkait pembangunan wilayah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kemantren dan kelurahan sebagai bagian pelayanan publik.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan

- Tahapan ini melanjutkan tahap I untuk penguatan kompetensi ASN agar memiliki kinerja unggul dengan meningkatkan kemampuan komunikasi publik, dan etika pelayanan, serta menerapkan menerapkan budaya kerja "Cepat, Tepat, Transparan, dan Ramah".
- Monitoring & Evaluasi Kualitas pelayanan dengan cara memantau pelaksanaan SOP pelayanan dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala untuk memantau kinerja pelayanan.

c. Penguatan Infrastruktur Pendukung

- Optimalisasi Ruang Pelayanan:

  Penataan ruang pelayanan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan.

  Penambahan loket pelayanan khusus saat beban tinggi.

- Pemanfaatan Teknologi:

  Dengan memanfaatkan notifikasi SMS/WhatsApp untuk status layanan dan mengoptimalkan alat cetak dokumen (ADM) mandiri secara efektif.

d. Strategi Kolaborasi

Kemantren Wirobrajan juga akan menjalin sinergi lintas OPD yaitu membangun **k**erja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian dan OPD terkait untuk integrasi layanan.

3. Tahap III. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Adapun strategi Kemantren Wirobrajan pada tahap akselerasi pembangunan prioritas adalah **:**

a. Fokus pada Program Prioritas

- Menentukan program prioritas kemantren Wirobrajan (infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, lingkungan, dan pelayanan publik).
- Menyusun roadmap percepatan program agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan rutin.

b. Penguatan Data & Perencanaan Berbasis Kinerja

- Mengoptimalkan pemanfaatan data spasial dan data sosial-ekonomi wilayah.
- Menetapkan indikator kinerja pembangunan prioritas yang terukur.
- Melaksanakan musrenbang tematik untuk menyaring program strategis.

c. Akselerasi Pelaksanaan Program

- Penyederhanaan Proses: Memangkas birokrasi internal dalam pengajuan program dan realisasi kegiatan.
- Penggunaan Teknologi: Sistem monitoring pembangunan berbasis digital agar progres cepat terpantau.
- Skema Padat Karya**:** Melibatkan masyarakat langsung dalam pembangunan infrastruktur lingkungan.

d. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat

- Pelatihan manajemen program percepatan bagi ASN kecamatan.
- Pembinaan kelembagaan masyarakat (LPMK, Karang Taruna, kelompok usaha) untuk mendukung program prioritas.
- Meningkatkan peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

e. Kolaborasi Multipihak

- Dengan OPD Kota/Kabupaten: Sinergi program prioritas (contoh: sanitasi dari Dinas PU, pemberdayaan UMKM dari Dinas Koperasi).
- Dengan Dunia Usaha: CSR untuk pembangunan fisik dan sosial.
- Dengan Perguruan Tinggi/Komunitas: Dukungan riset, pendampingan, dan inovasi teknologi.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Reward

- Menetapkan target capaian tiap triwulan untuk setiap program prioritas.
- Melaksanakan evaluasi terbuka dengan melibatkan masyarakat.
- Memberikan apresiasi bagi kelurahan atau kelompok masyarakat yang berkontribusi besar pada percepatan pembangunan.

4. Tahap IV. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Dalam melaksanakan tahap IV yaitu Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kemantren Wirobrajan , strategi yang akan dilakukan adalah :

a. Penguatan Perencanaan Terpadu

- Menyusun dokumen perencanaan kecamatan yang selaras dengan RPJMD, RKPD Kota/Kabupaten, dan Musrenbang Kelurahan.
- Mengintegrasikan data pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur) dalam satu sistem informasi.
- Mengedepankan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

b. Sinkronisasi Program Lintas Sektor

- Mengkoordinasikan program lintas OPD agar kegiatan di Kemantren tidak tumpang tindih.
- Menghubungkan program pemerintah dengan inisiatif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
- Melakukan pemetaan potensi wilayah sehingga program saling mendukung.

c. Pembangunan Berbasis Partisipasi

- Memperkuat peran masyarakat dalam setiap tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan).
- Membina kelembagaan masyarakat (PKK, Karang Taruna, LPMK, UMKM) agar lebih mandiri.
- Melibatkan kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan, anak) dalam forum musyawarah.

d. Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial
   - Mengarusutamakan prinsip ekonomi hijau dan ramah lingkungan dalam pembangunan (pengelolaan sampah, penghijauan, energi terbarukan).
   - Mendorong pengembangan UMKM lokal berbasis potensi wilayah agar ekonomi masyarakat tumbuh berkelanjutan.
   - Menjamin akses layanan publik yang merata untuk semua lapisan masyarakat.

e. Pemanfaatan Teknologi
   - Optimalisasi layanan kemantren berbasis online untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
   - Sistem informasi pembangunan yang terintegrasi untuk memantau progres dan capaian.
   - Aplikasi pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan berkelanjutan.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan
   - Menyusun indikator kinerja pembangunan yang mengukur aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
   - Melakukan evaluasi triwulanan dan tahunan dengan melibatkan masyarakat.
   - Mengadopsi prinsip *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) berdasarkan hasil evaluasi.

5. Tahap V Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Dalam tahap V ini Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan di Kemantren, maka strategi yang akan dilakukan Kemantren Wirobrajan adalah

a. Penyelesaian Program Prioritas
   - Menyusun daftar program/kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun berjalan (prioritas wajib tuntas).
   - Mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan melalui pemantauan intensif.

b. Konsolidasi Data dan Capaian
   - Menyusun Laporan Kinerja Pembangunan Kemantren berbasis data terukur.
   - Mengintegrasikan capaian pembangunan kelurahan untuk dipetakan di level kemantren.
   - Dokumentasi praktik baik (*best practices*) agar dapat dijadikan rujukan pembangunan berikutnya.

c. Penguatan Kelembagaan dan SDM
   - Meningkatkan kapasitas aparatur dalam manajemen program dan evaluasi pembangunan.
   - Membina lembaga kemasyarakatan (LPMK, PKK, Karang Taruna, UMKM) agar tetap berperan dalam kesinambungan program.
   - Menyiapkan kader pembangunan lokal sebagai penggerak berkelanjutan.

d. Penguatan Kolaborasi dan Jejaring
   - Konsolidasi dengan OPD, DPRD, dan dunia usaha untuk mendukung keberlanjutan program.
   - Menguatkan forum komunikasi lintas kelurahan dalam menyepakati prioritas pembangunan lanjutan.
   - Memastikan keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam perencanaan lanjutan.

e. Transisi dan Keberlanjutan Pembangunan
   - Menyusun roadmap keberlanjutan program agar tidak terhenti pada pergantian periode.
   - Mengidentifikasi program strategis yang perlu dilanjutkan di RPJMD/renstra berikutnya.
   - Menjaga kesinambungan pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis potensi wilayah.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas
   - Menetapkan indikator akhir untuk mengukur penyelesaian pembangunan di periode berjalan.
   - Melaksanakan evaluasi akhir periode pembangunan secara transparan.
   - Publikasi capaian dan pembelajaran pembangunan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berikut Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kemantren Wirobrajan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan kemantren Wirobrajan	-
			Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas lembaga Masyarakat	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Wirobrajan	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan	

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Penyusunan program pembangunan selalu mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi Kemantren Wirobrajan dalam menyusun Renstra Kemantren Wirobrajan serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja target kinerja Kemantren Wirobrajan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pijakan penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan tahun 2030.

Nomenklatur penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Kemantren Wirobrajan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sedangkan Program internal menggunakan penyeragaman program internal Perangkat Daerah. Program yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kemantren Wirobrajan sebagaimana terlampir di tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan				Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan (Poin)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan			Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan (Poin)		
			Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
						4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW,LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Wirobrajan		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
						2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Kelurahan Patangpuluhan	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Kelurahan Pakuncen	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Kelurahan Wirobrajan	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Kelurahan Pakuncen	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Kelurahan Patangpuluhan	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Kelurahan Pakuncen			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Kelurahan Patangpuluhan			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Kelurahan Wirobrajan			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Patangpuluhan)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Patangpuluhan)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Patangpuluhan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Wirobrajan		Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Wirobrajan (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Rentra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang mendukung Program dan Kegiatan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
   - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)
   - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)
   - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan:
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub kegiatan:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Sub kegiatan:
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, terdiri 1 sub kegiatan:
      - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren)
- Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)
- Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)
- Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif sebagai berikut di tabel 4.2 di bawah ini:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA				30,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan				30,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				30,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	0	1	30,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				30,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	0	1	30,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Kelurahan Pakuncen				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Kelurahan Patangpuluhan				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Kelurahan Wirobrajan				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100,000,000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Wirobrajan				10,000,000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310,000,000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	10,000,000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10,000,000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	-	1	10,000,000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				11,012,822,463		10.753.462.569		10.961.923.178		11.243.212.553		11.554.442.517		11.959.387.344		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,898,664,243		6.295.161.964		6.412.943.694		6.580.868.911		6.765.293.038		7.005.249.344		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Wirobrajan	Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur	6.295.161.964	Terkelola dan Terukur	6.412.943.694	Terkelola dan Terukur	6.580.868.911	Terkelola dan Terukur	6.765.293.038	Terkelola dan Terukur	7.005.249.344	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
	Nilai IKM Kemantren Wirobrajan (Nilai)	83,602	83.67		83,87		84,07		84,27		84,47		84,67			
	Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,125,400		8.025.400		8.188.651		8.192.808		8.415.585		8.705.434		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	11,125,400	8	8.025.400	8	8.188.651	8	8.192.808	8	8.415.585	8	8.705.434		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,510,000		1.630.000		1.663.173		1.664.033		1.709.297		1.768.185		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3,510,000	4	1.630.000	4	1.663.173	4	1.664.033	4	1.709.297		1.768.185		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				960,100		720.100		734.746		735.117		755.104		781.109		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	960,100	1	720.100	1	734.746	1	735.117	1	755.104	1	781.109		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				960,100		720.100		734.746		735.117		755.104		781.109		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	960,100	1	720.100	1	734.746	1	735.117	1	755.104	1	781.109		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				960,100		720.100		734.746		735.117		755.104		781.109		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	960,100	1	720.100	1	734.746	1	735.117	1	755.104	1	781.109		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				960,100		720.100		734.746		735.117		755.104		781.109		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	960,100	1	720.100	1	734.746	1	735.117	1	755.104	1	781.109		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3,115,000		2.855.000		2.913.070		2.914.543		2.993.789		3.096.895		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	3,115,000	8	2.855.000	8	2.913.070	8	2.914.543	8	2.993.789	8	3.096.895		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				660,000		660.000		673.424		673.764		692.083		715.918		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	660,000	1	660.000	1	673.424	1	673.764	1	692.083	1	715.918		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,438,144,000		4.890.082.857		4.979.285.274		5.146.485.146		5.291.908.377		5.481.121.313		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,438,144,000	1	4.890.082.857	1	4.979.285.274	1	5.146.485.146	1	5.291.908.377	1	5.481.121.313		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	1		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35		33		33		33		33		33			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.887.442.857		4.976.591.580		5.143.790.091		5.289.140.045		5.478.257.641		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35	5,434,264,000	33	4.887.442.857	33	4.976.591.580	33	5.143.790.091	33	5.289.140.045	33	5.478.257.641		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				1,140,000		660.000		673.424		673.764		692.083		715.918		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1,140,000	12	660.000	12	673.424	12	673.764	12	692.083	12	715.918		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				680,000		440.000		448.949		449.176		461.389		477.279		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	680,000	12	440.000	12	448.949	12	449.176	12	461.389	12	477.279		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				460,000		440.000		448.949		449.176		461.389		477.279		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	460,000	1	440.000	1	448.949	1	449.176	1	461.389	1	477.279		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				460,000		220.000		224.474		224.587		230.693		238.638		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	460,000	1	220.000	1	224.474	1	224.587	1	230.693	1	238.638		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				680,000		440.000		448.949		449.176		461.389		477.279		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	680,000	12	440.000	12	448.949	12	449.176	12	461.389	12	477.279		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				460,000		440.000		448.949		449.176		461.389		477.279		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	460,000	1	440.000	1	448.949	1	449.176	1	461.389	1	477.279		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3,060,000		9.680.000		9.876.888		9.881.880		10.150.564		10.500.145		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	3,060,000	1	9.680.000	1	9.876.888	1	9.881.880	1	10.150.564	1	10.500.145		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3,060,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	3,060,000	1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.572.117	1	1.614.862	1	1.670.477		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3,060,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	3,060,000	1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.572.117	1	1.614.862	1	1.670.477		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3,060,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	1	3,060,000	1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.572.117	1	1.614.862	1	1.670.477		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3,060,000		1.980.000		2.020.273		2.021.295		2.076.254		2.147.760		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3,060,000	12	1.980.000	12	2.020.273	12	2.021.295	12	2.076.254	12	2.147.760		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3,060,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	3,060,000	1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.572.117	1	1.614.862	1	1.670.477		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3,060,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	3,060,000	1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.572.117	1	1.614.862	1	1.670.477		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,220,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	3	3,220,000	3	1.540.000	3	1.571.323	3	1.572.117	3	1.614.862	3	1.670.477		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3,220,000		1.540.000		1.571.323		1.572.117		1.614.862		1.670.477		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	3	3,220,000	3	1.540.000	3	1.571.323	3	1.572.117	3	1.614.862	3	1.670.477		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				182,021,941		135.440.707		138.195.568		138.265.484		142.024.919		146.916.254		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	182,021,941	2	135.440.707	2	138.195.568	2	138.265.484	2	142.024.919	2	146.916.254		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	13	13		13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	8		8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,880,000		9.822.160		10.021.942		10.027.012		10.299.646		10.654.365		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	8,880,000	4	9.822.160	4	10.021.942	4	10.027.012	4	10.299.646	4	10.654.365		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53,679,441		43.227.947		44.107.203		44.129.518		45.329.399		46.890.543		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	19,352,500	3	43.227.947	3	44.107.203	3	44.129.518	3	45.329.399	3	46.890.543		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19,352,500		19.226.000		19.617.056		19.626.981		20.160.638		20.854.970		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	8	19,352,500	8	19.226.000	8	19.617.056	8	19.626.981	8	20.160.638	8	20.854.970		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27,740,000		26.124.600		26.655.974		26.669.460		27.394.602		28.338.072		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	27,740,000	2	26.124.600	2	26.655.974	2	26.669.460	2	27.394.602	2	28.338.072		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,950,000		1.950.000		1.989.663		1.990.669		2.044.795		2.115.217		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	13	13	1,950,000	13	1.950.000	13	1.989.663	13	1.990.669	13	2.044.795	13	2.115.217		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70,420,000		35.090.000		35.803.730		35.821.844		36.795.839		38.063.087		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1	70,420,000	12	35.090.000	12	35.803.730	12	35.821.844	12	36.795.839	12	38.063.087		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				125,022,597		85.425.000		87.162.544		87.206.642		89.577.789		92.662.847		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	15	125,022,597	14	85.425.000	14	87.162.544	14	87.206.642	14	89.577.789	14	92.662.847		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	12		7		7		7		7		7			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				38,054,000		14.100.000		14.386.794		14.394.072		14.785.446		15.294.656		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	12	38,054,000	7	14.100.000	7	14.386.794	7	14.394.072	7	14.785.446	7	15.294.656		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86,968,597		71.325.000		72.775.750		72.812.570		74.792.343		77.368.191		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	15	86,968,597	14	71.325.000	14	72.775.750	14	72.812.570	14	74.792.343	14	77.368.191		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				930,069,992		927.098.000		945.955.173		946.433.767		972.167.300		1.005.648.740		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	930,069,992	12	927.098.000	12	945.955.173	12	946.433.767	12	972.167.300	12	1.005.648.740		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,650,000		3.650.000		3.724.241		3.726.125		3.827.438		3.959.254		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3,650,000	12	3.650.000	12	3.724.241	12	3.726.125	12	3.827.438	12	3.959.254		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126,499,992		117.000.000		119.379.780		119.440.178		122.687.756		126.913.122		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	126,499,992	12	117.000.000	12	119.379.780	12	119.440.178	12	122.687.756	12	126.913.122		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				799,920,000		806.448.000		822.851.152		823.267.464		845.652.106		874.776.364		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	799,920,000	12	806.448.000	12	822.851.152	12	823.267.464	12	845.652.106	12	874.776.364		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206,000,313		237.870.000		242.708.273		242.831.067		249.433.642		258.024.134		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4	206,000,313	4	237.870.000	4	242.708.273	4	242.831.067	4	249.433.642	4	258.024.134		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-		9		9		9		9		9			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55	82		66		66		66		66		66			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	16		16		16		16		16		16			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26,240,000		24.040.000		24.528.973		24.541.383		25.208.663		26.076.849		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	1	26,240,000	1	24.040.000	1	24.528.973	1	24.541.383	1	25.208.663	1	26.076.849		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67,392,000		69.067.000		70.471.822		70.507.476		72.424.574		74.918.876		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	16	67,392,000	16	69.067.000	16	70.471.822	16	70.507.476	16	72.424.574	16	74.918.876		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		1.125.000		1.147.882		1.148.462		1.179.688		1.220.316		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	9	1.125.000	9	1.147.882	9	1.148.462	9	1.179.688	9	1.220.316		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33,778,000		64.888.000		66.207.821		66.241.318		68.042.419		70.385.799		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55	82	33,778,000	66	64.888.000	66	66.207.821	66	66.241.318	66	68.042.419	66	70.385.799		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78,590,313		78.750.000		80.351.775		80.392.428		82.578.298		85.422.294		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4	78,590,313	4	78.750.000	4	80.351.775	4	80.392.428	4	82.578.298	4	85.422.294		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				401,460,000		418.355.000		426.864.063		437.698.668		449.597.788		465.079.868		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan (Poin)	113,33	113.33	364,436,000	111,66	418.355.000	114	426.864.063	114,33	437.698.668	114,66	449.597.788	115	465.079.868	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				364,436,000		379.970.000		387.698.313		398.513.103		409.346.768		423.442.604		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	364,436,000	2	379.970.000	2	387.698.313	2	398.513.103	2	409.346.768	2	423.442.604		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				364,436,000		379.970.000		387.698.313		398.513.103		409.346.768		423.442.604		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	364,436,000	2	379.970.000	2	387.698.313	2	398.513.103	2	409.346.768	2	423.442.604		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				37,024,000		38.385.000		39.165.750		39.185.565		40.251.020		41.637.264		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	2	37,024,000	5	38.385.000	5	39.165.750	5	39.185.565	5	40.251.020	5	41.637.264		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	3	4		5		5		5		5		5			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5,470,000		7.780.000		7.938.245		7.942.261		8.158.211		8.439.179		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	2	5,470,000	5	7.780.000	5	7.938.245	5	7.942.261	5	8.158.211	5	8.439.179		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4	31,554,000		30.605.000		31.227.505		31.243.304		32.092.809		33.198.085		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	3	4	31,554,000	5	30.605.000	5	31.227.505	5	31.243.304	5	32.092.809	5	33.198.085		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,514,987,220		3.879.058.605		3.957.956.086		4.058.416.376		4.168.747.042		4.312.299.531		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	186,66	184,66	456,408,500	184,66	530.368.650	184,66	541.153.781	184,66	639.885.383	184,66	657.266.194	184,66	679.883.286	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				83,465,000		104.735.000		106.862.749		165.374.631		169.853.499		175.684.104		
Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	83,465,000	1	104.735.000	1	106.862.749	1	165.374.631	1	169.853.499	1	175.684.104		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83,465,000		104.735.000		106.862.749		165.374.631		169.853.499		175.684.104		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	83,465,000	1	104.735.000	1	106.862.749	1	165.374.631	1	169.853.499	1	175.684.104		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.399.414.955		3.468.559.050		3.510.313.923		3.605.759.355		3.729.941.703		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	210	210	87,102,500	210	50.725.000	210	51.756.745	210	91.782.930	210	94.278.507	210	97.525.458		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	9	3		3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				79,182,500		42.805.000		43.675.653		83.697.750		85.973.491		88.934.418		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	210	210	79,182,500	210	42.805.000	210	43.675.653	210	83.697.750	210	85.973.491	210	88.934.418		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				7,920,000		7.920.000		8.081.092		8.085.180		8.305.016		8.591.040		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	9	3	7,920,000	3	7.920.000	3	8.081.092	3	8.085.180	3	8.305.016	3	8.591.040		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				62,713,000		78.292.000		79.884.458		79.924.874		82.098.030		84.925.485		
Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	53,125,000	5	55.881.000	5	57.017.619	5	57.046.466	5	58.597.559	5	60.615.658		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				53,125,000		55.881.000		57.017.619		57.046.466		58.597.559		60.615.658		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	53,125,000	5	55.881.000	5	57.017.619	5	57.046.466	5	58.597.559	5	60.615.658		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW,LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	210	210	9,588,000	210	22.411.000	210	22.866.839	210	22.878.408	210	23.500.471	210	24.309.827		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				9,588,000		22.411.000		22.866.839		22.878.408		23.500.471		24.309.827		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	210	210	9,588,000	210	22.411.000	210	22.866.839	210	22.878.408	210	23.500.471	210	24.309.827		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				223,128,000		296.616.650		302.649.829		302.802.948		311.036.158		321.748.239		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	200			380	120.850.000	380	123.308.088	380	123.370.473	380	126.724.916	380	131.089.321		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	250		103,420,000	365		365		365		365		365			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				77,080,000		81.508.000		83.165.872		83.207.948		85.470.372		88.413.971		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	200	190	77,080,000	380	81.508.000	380	83.165.872	380	83.207.948	380	85.470.372	380	88.413.971		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				26,340,000		39.342.000		40.142.216		40.162.525		41.254.544		42.675.350		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	250	170	26,340,000	365	39.342.000	365	40.142.216	365	40.162.525	365	41.254.544	365	42.675.350		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	70	30	17,068,000	30	15.157.000	30	15.465.293	30	15.473.117	30	15.893.831	30	16.441.214		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				17,068,000		15.157.000		15.465.293		15.473.117		15.893.831		16.441.214		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	70	30	17,068,000	30	15.157.000	30	15.465.293	30	15.473.117	30	15.893.831	30	16.441.214		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50		102,640,000	130	160.609.650	130	163.876.448	130	163.959.358	130	168.417.411	130	174.217.704		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100			180		180		180		180		180			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	90			250		250		250		250		250			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	120			250		250		250		250		250			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				65,100,000		65.410.000		66.740.439		66.774.205		68.589.795		70.952.027		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	120	200	65,100,000	250	65.410.000	250	66.740.439	250	66.774.205	250	68.589.795	250	70.952.027		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				7,210,000		38.505.000		39.288.191		39.308.068		40.376.854		41.767.432		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100	150	7,210,000	180	38.505.000	180	39.288.191	180	39.308.068	180	40.376.854	180	41.767.432		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				4,950,000		6.884.650		7.024.683		7.028.237		7.219.334		7.467.967		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50	130	4,950,000	130	6.884.650	130	7.024.683	130	7.028.237	130	7.219.334	130	7.467.967		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				25,380,000		49.810.000		50.823.135		50.848.848		52.231.428		54.030.278		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	90	230	25,380,000	250	49.810.000	250	50.823.135	250	50.848.848	250	52.231.428	250	54.030.278		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Pakuncen)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	186,66	184,66	1,015,627,420	184,66	987.845.830	184,66	1.007.938.613	184,66	1.008.448.567	184,66	1.035.868.283	184,66	1.071.543.585		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,058,578,720		3.399.414.955		3.468.559.050		3.510.313.923		3.605.759.355		3.729.941.703		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	82	82	582,955,620	82	651.607.550	82	664.861.247	82	665.197.625	82	683.284.348	82	706.816.660		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				582,955,620		651.607.550		664.861.247		665.197.625		683.284.348		706.816.660		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	82	82	582,955,620	82	651.607.550	82	664.861.247	82	665.197.625	82	683.284.348	82	706.816.660		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12	12	432,671,800	6	336.238.280	6	343.077.366	6	343.250.942	6	352.583.935	6	364.726.925		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				432,671,800		336.238.280		343.077.366		343.250.942		352.583.935		364.726.925		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12	12	432,671,800	6	336.238.280	6	343.077.366	6	343.250.942	6	352.583.935	6	364.726.925		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Patangpuluhan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	186,66	184,66	827,468,500	184,66	1.160.344.000	184,66	1.183.945.396	184,66	1.184.544.398	184,66	1.216.752.159	184,66	1.258.657.103		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,058,578,720		3.399.414.955		3.468.559.050		3.510.313.923		3.605.759.355		3.729.941.703		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	139	139	647,220,900	139	783.679.000	139	799.619.030	139	800.023.587	139	821.776.228	139	850.078.201		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				647,220,900		783.679.000		799.619.030		800.023.587		821.776.228		850.078.201		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	139	139	647,220,900	139	783.679.000	139	799.619.030	139	800.023.587	139	821.776.228	139	850.078.201		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	44	31	180,247,600	31	376.665.000	31	384.326.366	31	384.520.811	31	394.975.931	31	408.578.902		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				180,247,600		376.665.000		384.326.366		384.520.811		394.975.931		408.578.902		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	44	31	180,247,600	31	376.665.000	31	384.326.366	31	384.520.811	31	394.975.931	31	408.578.902		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Wirobrajan (Kelurahan Wirobrajan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	186,66	184,66	1,215,482,800	184,66	1.200.500.125	184,66	1.224.918.296	184,66	1.225.538.028	184,66	1.258.860.406	184,66	1.302.215.557		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,058,578,720		3.399.414.955		3.468.559.050		3.510.313.923		3.605.759.355		3.729.941.703		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	172	172	705,080,000	172	622.776.625	172	635.443.901	172	635.765.396	172	653.051.857	172	675.542.962		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				705,080,000		622.776.625		635.443.901		635.765.396		653.051.857		675.542.962		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	172	172	705,080,000	172	622.776.625	172	635.443.901	172	635.765.396	172	653.051.857	172	675.542.962		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	48	7	510,402,800	7	577.723.500	7	589.474.395	7	589.772.632	7	605.808.549	7	626.672.595		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				510,402,800		577.723.500		589.474.395		589.772.632		605.808.549		626.672.595		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	48	7	510,402,800	7	577.723.500	7	589.474.395	7	589.772.632	7	605.808.549	7	626.672.595		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				104,217,000		78.253.000		79.844.614		81.871.219		84.096.941		86.992.853		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Wirobrajan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100	104,217,000	100	78.253.000	100	79.844.614	100	81.871.219	100	84.096.941	100	86.992.853	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				104,217,000		78.253.000		79.844.614		81.871.219		84.096.941		86.992.853		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada				0		0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	24	24	104,217,000	24	78.253.000	24	79.844.614	24	81.871.219	24	84.096.941	24	86.992.853		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				104,217,000		78.253.000		79.844.614		81.871.219		84.096.941		86.992.853		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	24	24	104,217,000	24	78.253.000	24	79.844.614	24	81.871.219	24	84.096.941	24	86.992.853		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				93,494,000		82.634.000		84.314.721		84.357.379		86.707.708		89.765.748		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	93,494,000	100	82.634.000	100	84.314.721	100	84.357.379	100	86.707.708	100	89.765.748	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				93,494,000		82.634.000		84.314.721		84.357.379		86.707.708		89.765.748		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50	60	7,840,000	60	4.000.000	60	4.081.306	60	4.083.371	60	4.194.022	60	4.338.056		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				7,840,000		4.000.000		4.081.306		4.083.371		4.194.022		4.338.056		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50	60	7,840,000	60	4.000.000	60	4.081.306	60	4.083.371	60	4.194.022	60	4.338.056		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	2	85,654,000	2	78.634.000	2	80.233.415	2	80.274.008	2	82.513.686	2	85.427.692		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				85,654,000		78.634.000		80.233.415		80.274.008		82.513.686		85.427.692		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	2	85,654,000	2	78.634.000	2	80.233.415	2	80.274.008	2	82.513.686	2	85.427.692		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis dari Wali Kota terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi-Misi calon kepala daerah di KPUD, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikaan warga, melalui program uggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda

2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program uggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program uggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program uggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni
   c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program uggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
   c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan

d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Dalam upaya mendukung terwujudnya sasaran dari program prioritas tersebut Kemantren Wirobrajan akan melaksanakan dan mengintegrasikan dalam semua aspek pembangunan di wilayah baik yang ada pendanaanya dari APBD maupun yang tidak tercover dalam anggaran Kemantren Wirobrajan.

Kemantren Wirobrajan memiliki kewenangan yang terbatas sehingga untuk pelaksanaan program prioritas tersebut Kemantren Wirobrajan akan menjadi *supporting unit* bagi OPD teknis yang membidangi. Berikut ini adalah peran Kemantren Wirobrajan dalam mendukung terwujudnya program prioritas :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.	Meningkatkan derajat pendidikaan warga	Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dan mendukung pembangunan berkelanjutan		Kemantren Wirobrajan sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu
2.	Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH**)** masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan Patangpuluhan)	Selain melaksanakan kegiatan internal, Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu
3.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat	Peningkatan nilai tambah produk rakyat	a.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan) b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat c. Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Selain melaksanakan kegiatan internal, Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
4.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Peningkatan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD.		Kemantren Wirobrajan sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu
5.	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan berkeadilan serta terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat.	-melakukan survey anti korupsi - penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis lainnya
6.	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Sosial (IPS)	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Selain melaksanakan kegiatan internal, Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
			- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya. - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup. - Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. e. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. f. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
7.	Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan DIY	a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren) - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	Selain melaksanakan kegiatan internal, Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
			Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendamping Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan) b. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	
8.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana - Sub kegiatan penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan) - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan	Selain melaksanakan kegiatan internal, Kemantren Wirobrajan juga sebagai Supporting unit bagi OPD teknis Pengampu

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Wirobrajan

Kemantren Wirobrajan akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan, adapun **tujuan Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan.**

- Indikator kinerja: Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan.
- Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
  1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan
     - Indikator kinerja : Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan;
  2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif
     - Indikator kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan;

Target Tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.07.0000 - Kemantren Wirobrajan									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan	Poin	497,2	497,46	497,73	498	498,26	498,53	498,8	
3.	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren	Poin	380	380,33	380,66	381	381,33	381,66	382	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan	Nilai	AA (90,009)	A (80 - 90)	A (80 - 90)	A (80 - 90)	A (80 - 90)	A (80 - 90)	A (80 - 90)	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Kemantren Wirobrajan pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029. Renstra juga sebagai pedoman bagi para fasilitator Pembangunan agar dapat melaksanakan Pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Renstra ini dijabarkan untuk setiap tahun dengan Rencana Kerja (Renja) Kemantren Wirobrajan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan output dan outcome dari penggunaan anggaran.
Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditentukan pada saat merumuskan Rencana strategis Instansi.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029 menjadi instrument Pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban.

L A M P I R A N

POHON KINERJA
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

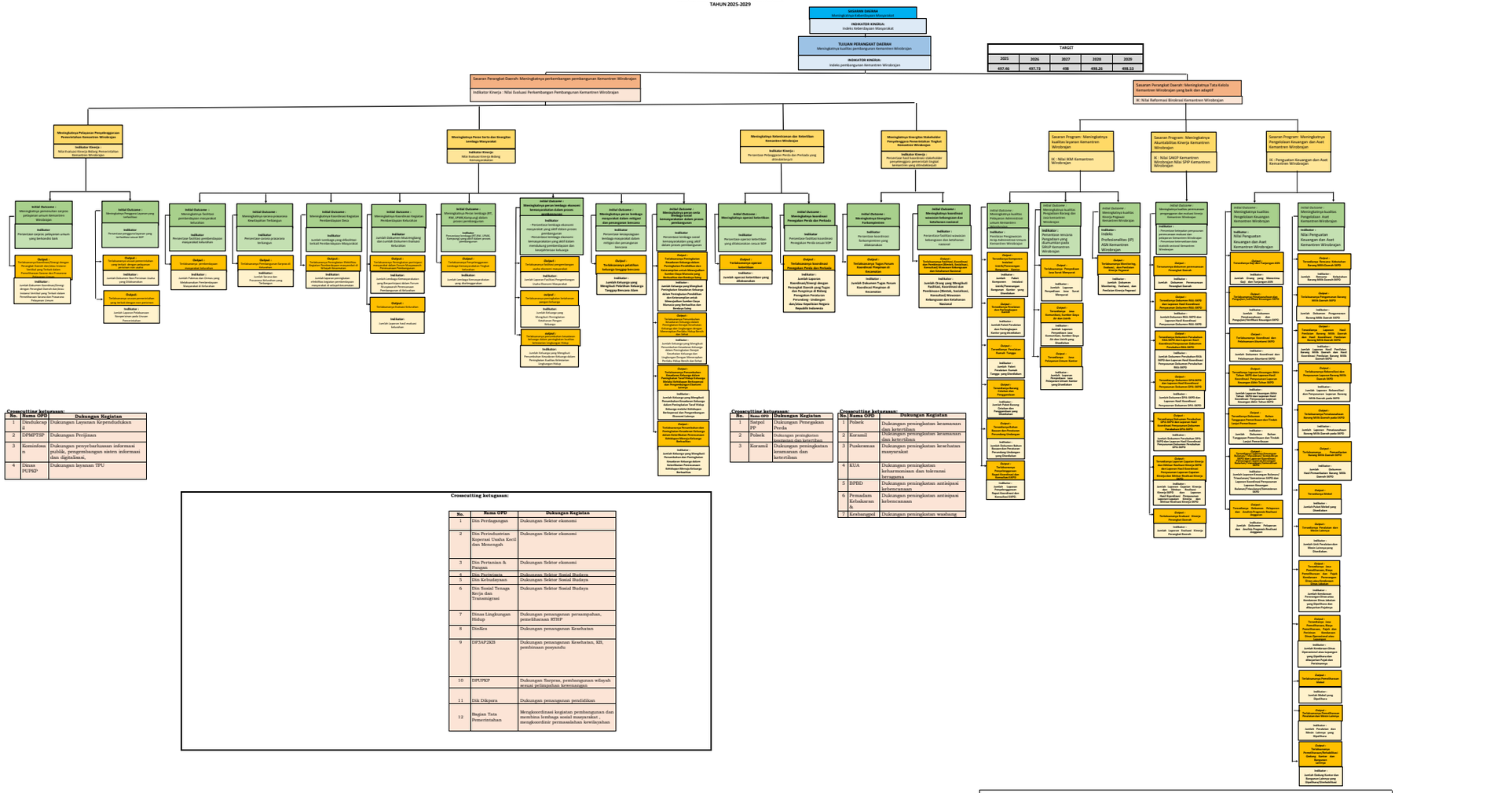

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dindukcapil	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perijinan
3	Kominfosa n	Dukungan penyebarluasaan informasi publik, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi,
4	Dinas PUPKP	Dukungan layanan TPU

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama
5	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6	Pemadam Kebakaran &	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7	Kesbangpol	Dukungan peningkatan wasbang

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Perdagangan	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din Pertanian & Pangan	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Pariwisata	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Kebudayaan	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	Dinas Lingkungan Hidup	Dukungan penanganan permasyahan, pemeliharaan RTHP
8	Dinkes	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DPTAP2KB	Dukungan penanganan Kesehatan, KB, pemberdayaan pemuda
10	DPUPKP	Dukungan Sarpras, pembangunan wilayah sesuai pelimpahan kewenangan
11	Dik Dikpora	Dukungan penanganan pendidikan
12	Bagian Tata Pemerintahan	Mengkoordinasi kegiatan pembangunan dan memfasi lembaga sosial masyarakat , mengkoordinir permasalahan kewilayahan

Crosscutting ketugasan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bapperda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Money Ketersetujuan RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Karakteristarian
5	Inspektorat	Pengawasan dan Counulting
6	Dinas Kominfosandi	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan
8	BKPSDM	Dukungan administrasi kepegawaian, Indeks profesionalitas ASN Kemantren Wirobrajan, pengembangan SDM, pembinaan pegawai

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja - Pertama
Kota Yogyakarta

SARWANTO, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP 19730111 199802 400

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (sub Output)		Penganggu
1																																														
	Tulis Nama Perangkat Daerah	Tulis Tujuan Kolom ini diisi dengan Outcome pada Pohon Kinerja OPD (kalo berbeda dengan sasaran (jika bisa dipanjangkan)	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Silahkan Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Sasaran Strategis Silahkan Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Silhkan Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Program yang diambil dari Kepoksn 050	Tulis Sasaran Program (Hasil dari Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD)	Tulis Indikator Sasaran Program (Hasil dari Outcome/CSF pada Pohon Kinerja OPD)	Tuliskan cara menghitung indikator program	Tulis Nama Bidang Yang mengampu indikator program	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Kegiatan yang diambil dari Kepoksn 050	Tulis Sasaran Kegiatan (Hasil dari Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Sasaran Kegiatan/Hasil Outcome pada Pohon Kinerja OPD	Tuliskan cara menghitung indikator kegiatan	Tulis Nama Bidang/Sekci Yang mengampu indikator kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tulis Nama Sub Kegiatan yang diambil dari Kepoksn 050	Tulis Kinerja Operasional/Output pada Pohon Kinerja OPD	Tulis Indikator Kinerja Output pada Pohon Kinerja	Tulis Nama Sekretaris Yang mengampu indikator subkegiatan	
1	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kualitas pembangunan kemantren Wirobrajan	Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan	80% nilai evaluasi pembangunan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	497,46 poin	497,73 poin	498 poin	498,26 poin	498,53 poin	498,80 poin	Meningkatnya Pembentukan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Pelembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi pembangunan pembangunan Kemantren Wirobrajan x jumlah nilai pelembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan	380,33 poin	380,66 poin	381 poin	381,33 poin	381,66 poin	382 poin	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Pelembangan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Jawatan Kemakmuran	513,33 poin	513,66 poin	514 poin	514,33 poin	514,66 poin	515 poin	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Wirobrajan	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	Dihitung dari jumlah sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan kemakmuran
																													Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pengguna layanan yang terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	Dihitung dari jumlah layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	Jawatan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Difasilitasikan	Jawatan Umum
																																								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan pada Urusan Pemerintahan	Jawatan Umum
																			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Jawatan Sosial, Jawatan Pmpk, Jawatan Kemasan, Jawatan Kemakmuran	184,66 poin	184,66 poin	184,66 poin	184,66 poin	184,66 poin	184,66 poin	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga	Jawatan Sosial	18 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jawatan Sosial
																													Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenglbang yang disusun secara tepat waktu	Jumlah Dokumen	Jawatan Pmpk	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jawatan Pmpk
																															Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Perundangn.	Jumlah Dokumen	Jawatan pmpk	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kelurahan	Jawatan Pmpk
																													Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Kelurahan Pakuncen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Terlaksananya Pembangunan Sarpras di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pakuncen
																																		Kelurahan Wirobrajan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Terlaksananya Pembangunan Sarpras di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Wirobrajan
																																		Kelurahan Patangpuluhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)	Terlaksananya Pembangunan Sarpras di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Patangpuluhan
																													Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Kelurahan Pakuncen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Polsmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakuncen
																																		Kelurahan Wirobrajan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Polsmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wirobrajan
																																		Kelurahan Patangpuluhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Polsmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Patangpuluhan
																													Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran lembaga LPT, Rw, LPMK,Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga LPT,RW, LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang direncanakan dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Penyamenggaraan lembaga kemasyarakatan Tingkat kelurahan	Terlaksananya Penyamenggaraan lembaga kemasyarakatan Tingkat kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Jawatan Kemakmuran
																				Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jawatan Kemakmuran
																			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Jawatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jawatan Sosial
																																							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jawatan Sosial
																																							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarof Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarof Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarof Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jawatan Sosial
																																							Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pencegahan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pencegahan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketetibtatan Pencegahan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jawatan Sosial
																													Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pembentukan dan kesejahteraan keluarga	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam mendukung pembentukan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam mendukung pembentukan dan kesejahteraan keluarga direncanakan x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jawatan kemakmuran
																																							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Ketertarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas ketertarian lingkungan hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Ketertarian Lingkungan Hidup	Jawatan kemakmuran
																													Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	Jawatan Kemakman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peduliban Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pedulliban keluarga tanggap bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peduliban Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Kemanan
																			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kemantren Wirobrajan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	Jawatan Kemanan dan Jawatan Pmpk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Penerapan dan Pengajian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100%	Jawatan Kemanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya operasi ketertiban	Jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan	Jawatan Kemanan
																				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%									Terlaksananya koordinasi Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
																			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%	Jawatan Kemanan dan Jawatan Pmpk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Dihitung dari jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	Jawatan Kemanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bkmtnk, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bkmtnk, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bkmtnk, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Kemanan
																													Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Meningkatnya Sinergitas Forkopimkecam	Persentase koordinasi forkompimkem yang dilaksanakan	Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimkem dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimkem yang direncanakan x 100%	Jawatan Pmpk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Pmpk
										Meningkatnya Tata kelola kemantren Wirobrajan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil pemdaan reformasi birokrasi oleh inspektorat	A (80-90) Nilai	A (80-90) Nilai	A (80-90) Nilai	A (80-90) Nilai	A (80-90) Nilai	A (80-90) Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan kemantren Wirobrajan	Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan Nilai RB Kemantren Wirobrajan Nilai IKM Kemantren Wirobrajan	Hasil pemdaan SAKIP oleh Inspektorat	Mantri Anom	A (86,45-96,46)	A (86,46-86,47)	A (86,47-86,48)	A (86,48-86,49)	A (86,49-86,50)	A (86,50-86,51)	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kemantren wirobrajan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kemantren Wirobrajan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kemantren Wirobrajan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kemantren Wirobrajan yang wajib disusun x 100%	Sub Bagian Keuangan dan PUP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bagian Keuangan dan PUP

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target							Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu
2														Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat		Terlaksa nanya dan Terukur (4,000 - 4,500	Terlaksa nanya dan Terukur (4,000 - 4,500	Terlaksa nanya dan Terukur (4,000 - 4,500	Terlaksa nanya dan Terukur (4,000 - 4,500	Terlaksa nanya dan Terukur (4,000 - 4,500														Persentase keterwakilan data statistik sectoral kemenkrem Wirobrajan	Jumlah data statistik yang diwakilasi sesuai kemitrsuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	Sub Bagian Keuangan dan PKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwadahinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
														Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		84,67 nilai	84,67 nilai	84,67 nilai	84,67 nilai	84,67 nilai	84,67 nilai																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwadahinya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwadahinya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwadahinya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwadahinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																									Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh	Sub Bagian Keuangan dan PKP	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwadahinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwadahinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																								Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terwadahinya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwadahinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Terwadahinya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Bagian Keuangan dan PKP
																																	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Wirobrajan	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terwadahinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terwadahinya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																	Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Wirobrajan	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian IP ASN Kemantren Wirobrajan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	84,913 nilai	84,913 nilai	84,913 nilai	84,913 nilai	84,913 nilai	84,913 nilai	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kemantren Wirobrajan	Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian pengelolaan Arsip Kemantren Wirobrajan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	84,22 nilai	84,22 nilai	84,22 nilai	84,22 nilai	84,22 nilai	84,22 nilai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwadahinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwadahinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwadahinya Peralatan Rumah Tangga yang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																						Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwadahinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwadahinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Wirobrajan	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	Pengadaan Mebel	Terwadahinya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwadahinya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Wirobrajan	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi jumlah pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan	Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi jumlah pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan x 100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwadahnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diwadahkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwadahinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Wirobrajan	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwadahinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terwadahinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
																																					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tegalrejo, 6 Januari 2025
Camat Tegalrejo
Kota Yogyakarta

SAMUNDRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP 197203011996031009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, ditegaskan bahwa Kemantren merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020.

Untuk mencapai visi dan misinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat sebuah perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di Kemantren dan Kelurahan.

Renstra Kemantren Mantrijeron disusun sebagai suatu rencana strategis yang menjadi pedoman Kemantren Mantrijeron dalam mencapai tujuan organisasi serta untuk mewujudkan visi dan misi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan faktor pendukung maupun faktor penghambat, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal kemantren. Renstra yang tersusun berisikan tentang permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan yang terakhir kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Renstra Kemantren Mantrijeron Tahun 2025-2029 ini dibuat, semoga bermanfaat dan menjadi pedoman Kemantren Mantrijeron untuk mencapai tujuan pembangunan ke depan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja

NAROTAMA, S.STP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 198301262001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 37

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 37

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 40

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan 46

4.2. Program Prioritas 128

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 134

BAB V PENUTUP 138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin 9

Tabel 2.2 Data Pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 10

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 10

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon 10

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana 11

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeronn Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024..... 20

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja (Indikator Program) Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeronn Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026 21

Tabel 2.8 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 26

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 39

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah 41

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 44

Tabel 4.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 52

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah 70

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 130

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 134

Tabel 4.5 Kategori dan Predikat Nilai Reformasi Birokrasi..... 137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 37

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah 38

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra PD ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta yang digunakan untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra PD berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra PD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY:
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;.
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51):
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja;
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan kewilayahan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Program Prioritas

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Pembentukan organisasi Kemantren di wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota.

Untuk rincian tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Sedangkan terkait pelimpahan kewenangan diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

Berdasar aturan diatas, disebutkan bahwa:

1. Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
2. Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
4. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren

Mantrijeron Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas Kemantren.

5. Susunan Organisasi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta terdiri dari :
   a. Mantri Pamong Praja;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Jawatan Praja;
   d. Jawatan Keamanan;
   e. Jawatan Kemakmuran;
   f. Jawatan Sosial;
   g. Jawatan Umum;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   i. Kelurahan, terdiri dari :
      1) Lurah;
      2) Sekretariat;
      3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Keteriban;
      4) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
      5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
      6) Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

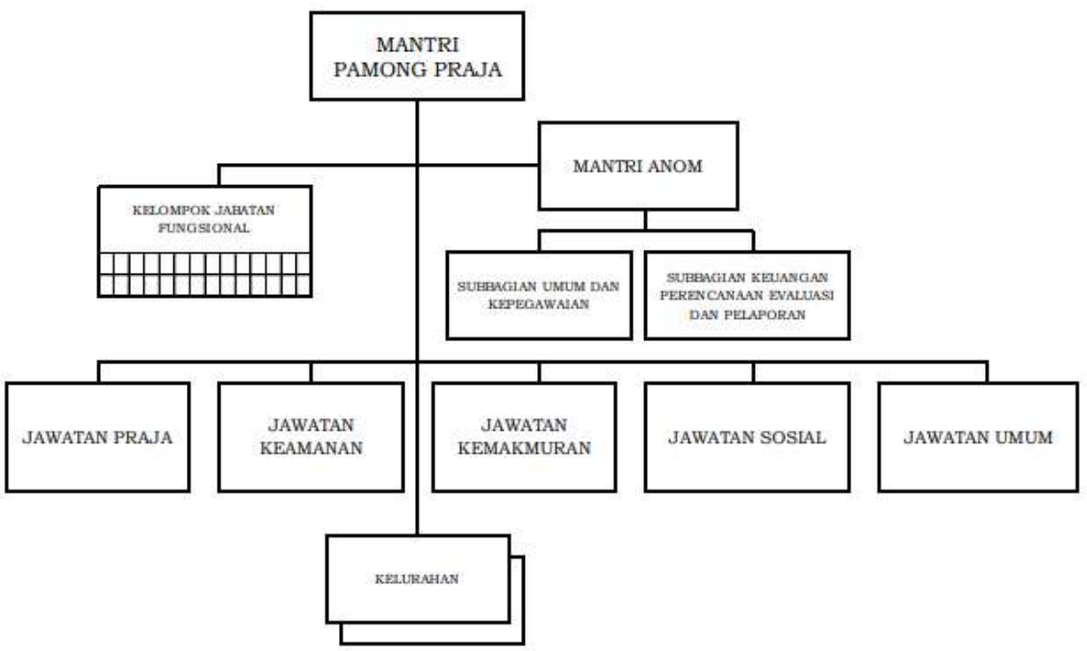

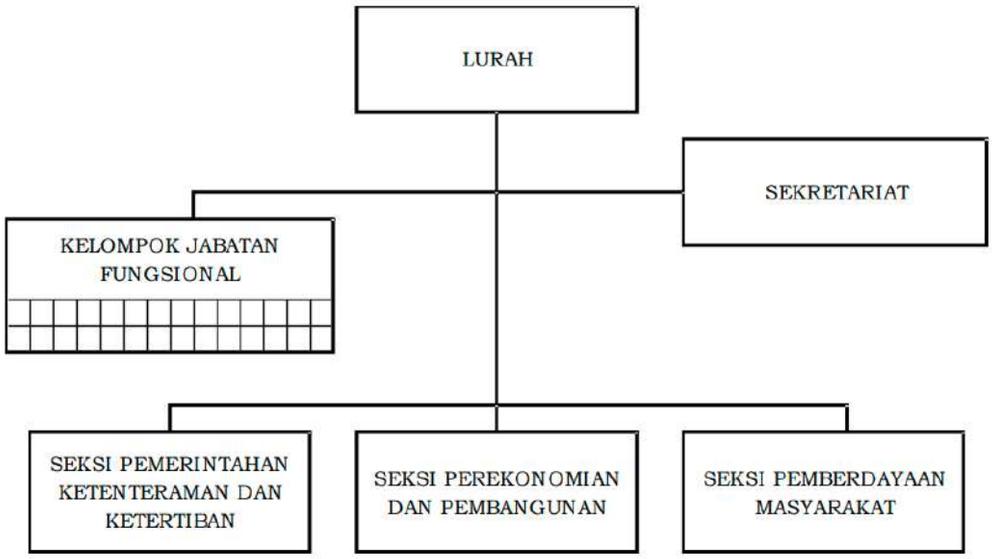

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kemantren Mantrijeron terdiri dari 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan Mantrijeron. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemantren Mantrijeron didukung oleh pegawai dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol IX	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mantri Anom	-	1	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Jawatan	2	2	-	-	-	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum Kemantren	3	7	1	-	4	4	1	10
6	PJLOP Kemantren	1	2	-	-	-	-	-	3
7	Lurah	3	-	-	-	-	3	-	3
8	Sekretaris Lurah	1	2	-	-	-	3	-	3
9	Kepala Seksi Kelurahan	3	2	-	-	-	5	-	5
10.	PJLOP Kelurahan	5	2	-	-	-	-	-	7
Jumlah		**18**	**20**	**1**	**-**	**4**	**19**	**4**	**38**

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Data Pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	0
2	Diklatpim IV	16	5	11
3	Struktural yang belum diklat penjenjangan	3	1	2

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan dari para pegawai antara lain, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA/Sederajat	0	0	0
4	Diploma	5	1	4
5	S1	17	9	8
6	S2	6	2	4

Dan apabila dilihat dari keterisian eselon jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	-	-	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	7	5	2
4	IV B	10	4	6

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yaitu bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana dan/atau fasilitas yang bergerak maupun yang tidak bergerak. tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Adapun jumlah dan kondisi sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya di Kemantren Mantrijeron adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
A. Kemantren Mantrijeron			
1	Pompa Air	1	Baik
2	Mobil	1	baik
3	Sepeda Motor	9	baik
4	Motor Roda 3	2	baik
5	Sepeda	1	baik
6	Termometer Standar	3	baik
7	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	baik
8	Lemari Besi/Metal	8	baik
9	Lemari Kayu	5	baik
10	Rak Besi	12	baik
11	Rak Kayu	2	baik
12	Filing Cabinet Besi	11	baik
13	Brandkas	1	baik
14	Lemari Kaca	4	baik
15	LED Running text	1	baik
16	Alat Penghancur Kertas	5	baik
17	LCD Projector/Infocus	3	baik
18	Layar LCD Projector	1	baik
19	Meubelair	18	baik
20	Meja Kerja Kayu	20	baik
21	Meja Rapat	21	baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
22	Tempat Tidur Kayu	2	baik
23	Meja Panjang	2	baik
24	Meja 1/2 Biro	5	baik
25	Kursi Rapat	26	baik
26	Kursi Tamu	5	baik
27	Kursi Putar	11	baik
28	Kursi Lipat	114	baik
29	Meja Komputer	2	baik
30	Jam Dinding	4	baik
31	Lemari Es	1	baik
32	AC	6	baik
33	Kipas Angin	6	baik
34	Kompor Gas (Alat Dapur)	3	baik
35	Tabung Gas	3	baik
36	Wireless	2	baik
37	Televisi	4	baik
38	Loudspeaker	2	baik
39	Sound System	6	baik
40	Megaphone	1	baik
41	Microphone	5	baik
42	Lambang Garuda Pancasila	1	baik
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	baik
44	Pataka	2	baik
45	Dispenser	5	baik
46	Vertikal Blind	1	baik
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	baik
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	baik
49	Tripod Camera	1	baik
50	Camera Digital	2	baik
51	Telepon	6	baik
52	HP	1	baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
53	HT	2	baik
54	P.C Unit	23	baik
55	Note Book	2	baik
56	Monitor	1	baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	baik
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	baik
59	webcam	6	baik
60	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	baik
61	Lemari Kaca	4	baik
62	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Es III	1	baik
63	Meja dan Kursi Tamu	1	baik
B. Kelurahan Gedongkiwo			
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Sepeda	1	Baik
3	Termometer Standar	1	Baik
4	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik
5	Lemari Besi/Metal	2	Baik
6	Lemari Kayu	3	Baik
7	Rak Besi	2	Baik
8	Filing Cabinet Besi	6	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Lemari Kaca	3	Baik
11	Papan Visual/Papan Nama	9	Baik
12	LCD Projector	2	Baik
13	Layar LCD Projector	1	Baik
14	Meja Kerja Kayu	16	Baik
15	Meja Rapat	4	Baik
16	Kursi Besi/Metal	11	Baik
17	Kursi kayu	4	Baik
18	Meja Telepon	2	Baik
19	Kursi Putar	6	Baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
20	Bangku Tunggu	2	Baik
21	Kursi Lipat	74	Baik
22	Meja Komputer	1	Baik
23	Jam Dinding	8	Baik
24	Alat Pendingin	1	Baik
25	Lemari Es	1	Baik
26	Kipas Angin	2	Baik
27	Wireless	1	Baik
28	Televisi	1	Baik
29	Radio	1	Baik
30	Loudspeaker	2	Baik
31	Sound System	4	Baik
32	Megaphone	1	Baik
33	Microphone	2	Baik
34	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
36	Pataka	2	Baik
37	LED Running text	1	Baik
38	Tripod Camera	1	Baik
39	Camera Digital	1	Baik
40	Telepon	1	Baik
41	Telepon Selular	1	Baik
42	HT	1	Baik
43	P.C Unit	7	Baik
44	Note Book	1	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
46	webcam	2	Baik
47	White Board	1	Baik
48	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
49	AC	1	Baik
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
51	Scanner	1	Baik
52	Tangga Aluminium	1	Baik
53	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
54	Stand mic	2	Baik
55	Alat tenis meja	6	Baik
56	Smartcard reader	1	Baik
C. Kelurahan Suryodiningratan			
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Portable Water Pump	1	Baik
3	Termometer Standar	1	Baik
4	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik
5	Lemari Besi/Metal	4	Baik
6	Lemari Kayu	5	Baik
7	Rak Besi	3	Baik
8	Filing Cabinet Besi	3	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Papan Visual/Papan Nama	5	Baik
11	LCD Projector/Infocus	2	Baik
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
13	Meubelair	3	Baik
14	Meja Rapat	12	Baik
15	Kursi Rapat	14	Baik
16	Kursi Putar	7	Baik
17	Bangku Tunggu	2	Baik
18	Kursi Lipat	114	Baik
19	Jam Dinding	4	Baik
20	Alat Pendingin	1	Baik
21	Lemari Es	1	Baik
22	Kipas Angin	7	Baik
23	Wireless	2	Baik
24	Televisi	2	Baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
25	Sound System	1	Baik
26	Megaphone	1	Baik
27	Wirelles	1	Baik
28	Tiang Bendera	1	Baik
29	Tangga Aluminium	1	Baik
30	Pataka	1	Baik
31	Dispenser	1	Baik
32	Vertikal Blind	1	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
34	LED Running text	1	Baik
35	Tripod Camera	1	Baik
36	Camera Digital	2	Baik
37	Telepon Selular	1	Baik
38	HT	1	Baik
39	P.C Unit	11	Baik
40	Note Book	1	Baik
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik
42	webcam	2	Baik
43	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	Baik
44	Alat Tenis Meja	6	Baik
45	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
46	Meja 1/2 Biro	1	Baik
47	Scanner	1	Baik
48	AC	2	Baik
49	Lemari Kaca	1	Baik
50	Alat Peraga Edukasi	12	Baik
51	Server	1	Baik
52	Modem	1	Baik
53	Smartcard reader	1	Baik
D. Kelurahan Mantrijeron			
1	Sepeda Motor	2	Baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
2	Sepeda	1	Baik
3	Termometer Standar	1	Baik
4	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik
5	Lemari Besi/Metal	1	Baik
6	Lemari Kayu	8	Baik
7	Rak Besi	6	Baik
8	Rak Kayu	2	Baik
9	Filing Cabinet Besi	6	Baik
10	Brandkas	2	Baik
11	Lemari Kaca	1	Baik
12	LCD Projector	2	Baik
13	Layar LCD Projector	1	Baik
14	Meja Rapat	3	Baik
15	Meja 1/2 Biro	11	Baik
16	Kursi Rapat	3	Baik
17	Kursi Putar	2	Baik
18	Bangku Tunggu	2	Baik
19	Kursi Lipat	49	Baik
20	Meja Komputer	2	Baik
21	Sofa	1	Baik
22	Jam Dinding	5	Baik
23	Alat Pendingin	1	Baik
24	Lemari Es	1	Baik
25	Kipas Angin	9	Baik
26	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	Baik
27	Wireless	3	Baik
28	Televisi	3	Baik
29	Tangga Aluminium	1	Baik
30	Loudspeaker	5	Baik
31	Sound System	1	Baik
32	Megaphone	1	Baik

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
33	Microphone	1	Baik
34	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	Baik
36	Pataka	2	Baik
37	Dispenser	2	Baik
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
39	LED Running text	1	Baik
40	Tripod Camera	1	Baik
41	Camera Digital	2	Baik
42	Telepon	1	Baik
43	Telepon Selular	1	Baik
44	HT	1	Baik
45	P.C Unit	8	Baik
46	Note Book	1	Baik
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
48	Webcam	2	Baik
49	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	Baik
50	Smartcard reader	1	Baik
51	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
52	AC	1	Baik
53	Scanner	1	Baik
54	Meja Rapat Pejabat	1	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
56	Alat Tenis Meja	6	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah pendukung urusan kewilayahan yang memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Guna mendukung urusan tersebut maka ditetapkan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren

Mantrijeron dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dan Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Indikator kinerja sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Untuk mendukung tercapainya mencapai sasaran strategis tersebut di atas maka disusunlah program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kinerja pelayanan Kemantren Mantrijeronn Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeronn Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Keterangan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Target Renstra	368 poin	371 poin	374 poin	383,67 poin	384,67 poin
		Realisasi	376 poin	378,33 poin	381,33 poin	383,67 poin	384,67 poin
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Target Renstra	-	-	-	AA Nilai	A Nilai
		Realisasi	-	-	-	A Nilai	A Nilai

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja (Indikator Program) Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeronn Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026

Program	Indikator Program	Keterangan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	Target Renstra	84,27 poin	84,57 poin	84,87 poin	84,97 poin	85,00 poin
		Realisasi	84,44 poin	84,58 poin	84,88 poin	84,98 poin	85,09 poin
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Target Renstra	550.000.000 Rupiah	565.000.000 Rupiah	1.000.000.000 Rupiah	1.572.000.000 Rupiah	1.587.000.000 Rupiah
		Realisasi	2.216.399.053 Rupiah	1.212.616.100 Rupiah	1.570.751.358 Rupiah	1.494.028.580 Rupiah	2.063.860.549 Rupiah
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Target Renstra	-	36	29	24	20
		Realisasi	-	29	24	20	20
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Target Renstra	-	-	-	76%	77%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Target Renstra	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
		Realisasi	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, kelompok sasaran layanan Kemantren Mantrijeron adalah warga masyarakat di wilayah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Kelompok sasaran tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, hingga kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, maupun pelaku usaha lokal. Selain itu, layanan Kemantren juga menyentuh kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam pelaksanaannya, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta berperan memberikan pelayanan administrasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang dekat dengan warga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan kepada masyarakat, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta bermitra dengan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemitraan ini dilakukan guna memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Adapun perangkat daerah yang menjadi mitra Kemantren Mantrijeron antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan layanan kependudukan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan perizinan.
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penyebarluasan informasi publik.
4. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi.
5. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi.
6. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi.
7. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Pariwisata.

8. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Budaya.
9. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Sosial.
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan persampahan.
11. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan Kesehatan.
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
13. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sarana prasarana.
14. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan Pendidikan.
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan antisipasi kebencanaan.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan antisipasi kebencanaan.
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan.
18. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Penegakan Perda.
19. Polsek Mantrijeron dalam dukungan kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban.
20. Koramil Mantrijeron dalam dukungan kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban.
21. KUA Mantrijeron dalam dukungan kegiatan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan.
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset.
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan.

25. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
26. Inspektorat Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Pengawasan dan Consulting.
27. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral.
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Pengelolaan kearsipan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020. Untuk rincian tugas Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Sedangkan terkait pelimpahan kewenangan diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Permasalahan pelayanan yang terjadi di Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta antara lain:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/personil pada Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
4. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan masih memerlukan dukungan dan pendampingan dari perangkat daerah

teknis terkait, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan :
    a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
    b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada keterbatasan kewenangan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
10. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Tabel 2.8 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Sinergitas dan peran aktif lembaga masyarakat dalam proses pembanguna, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, mitigasi dan penanganan bencana • Sarana prasarana pelayanan umum dan kewilayahan yang terbangun dan berkondisi baik	• Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Kemantren. • Beban kerja tinggi akibat penatausahaan keuangan, tidak sebanding dengan jumlah personil sesuai Anjab. • Sarana dan prasarana belum mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. • Pembangunan sarana-prasarana kelurahan masih perlu pendampingan dari OPD teknis. • Rasionalisasi anggaran menyebabkan:	• Pengelolaan Persampahan Yang Belum Optimal (Pilar Lingkungan) • Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah (Pilar Lingkungan) • Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik (Pilar Lingkungan) • Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan	• Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota • Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) • Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global • Disrupsi Informasi,	• Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan • Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan • Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana	• Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia • Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional • Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	• Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat • Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat • Pembangunan Kewilayahan • Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan • Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Pengguna layanan terfasilitasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) • Lembaga kemasyarakatan terfasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional • Operasi ketertiban dan fasilitasi koordinasi penegakan Perda dilaksanakan sesuai SOP	a. Penundaan dan pengurangan kegiatan kemasyarakatan. b. Pergeseran waktu kegiatan, pelaksanaan jadi kurang optimal. • Tuntutan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat tetap tinggi meskipun kewenangan terbatas. • Rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. • Penutupan TPST Piyungan berdampak pada sistem pengelolaan sampah lokal.	Ekonomi (Pilar Sosial) • Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi (Pilar Lingkungan) • Belum Optimalnya Transportasi Publik (Pilar Lingkungan) • Penegakan hukum terkait keamanan, ketenteraman, dan ketertiban (Pilar Hutakel)	Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	• Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional • Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional		• Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan dan lingkungan. • Minimnya sosialisasi peraturan perizinan dari Dinas Pengampu Kota yang tidak lagi mensyaratkan persetujuan wilayah.					

2.2.2. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kemantren Mantrijeron , antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemantren sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kemantren sampai pada tataran Pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesional;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN). Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunannya dilakukan secara internal dan telah ditetapkan melalui Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Nomor 012/KEP/I/2024 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta serta Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kemantren yang telah dilakukan review dan disusun dengan melibatkan unsur masyarakat dan telah ditetapkan melalui Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Nomor 085/KEP/MJ/VI/2024 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Disamping itu, Kemantren Mantrijeron merupakan satu dari empat Kemantren yang mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perizinan pemakaman adalah keterbatasan lahan makam yang tidak sebanding dengan kebutuhan serta masih banyaknya lahan makam yang tidak diurus oleh ahli warisnya. Upaya mewujudkan tertib administrasi perizinan makam dilakukan melalui penataan, digitalisasi dan registrasi/daftar ulang lahan pemakaman yang diwujudkan dalam Inovasi Mantra Sarilaya dan Inovasi Dalang Malaya.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Hingga saat ini kegiatan pelayanan pada masyarakat terus beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca Pandemi Covid-19. Mekanisme dan prosedur pelayanan untuk membatasi interaksi personal (layanan tatap muka) dengan masyarakat masih diterapkan. Sesuai dengan Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan serta untuk melaksanakan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau secara efektif dan efisien, diperlukan penggunaan layanan berbasis teknologi informasi

Layanan berbasis teknologi informasi di Kemantren Mantrijeron

dilaksanakan melalui layanan Whatsapp Pelayanan Kemantren Mantrijeron pada nomor 085600064191, whatsapp Kelurahan Gedongkiwo 0821-3563-0255, whatsapp Kelurahan Suryodiningratan 0852-2999-2224, whatsapp Kelurahan Mantrijeron 0813-8682-7332 dan jejaring sosial media yaitu Website, Instagram, dan Facebook. Guna mendukung optimalisasi pelayanan, sebagian alokasi pada perubahan anggaran dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana pelayanan Kemantren dan Kelurahan antara lain komputer dan AC (*air conditioner*).

Dengan adanya penerapan mekanisme dan prosedur layanan diharapkan masyarakat tetap dapat terlayani secara optimal dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk mendapatkan umpan balik, saran dan masukan dari masyarakat terhadap Pelayanan Kemantren Mantrijeron, dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan dengan sasaran pemohon layanan di Kemantren Mantrijeron. Pelaksanaan survey dilaksanakan secara manual maupun secara digital melalui Survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik. Untuk triwulan 4 ini, Survey Kepuasan Masyarakat ditambah dengan internal yaitu untuk pengguna layanan kemantren di lingkup OPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron tahun 2024 adalah sebesar 85,09 atau kategori BAIK.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kemantren Mantrijeron diusulkan melalui Mekanisme Musrenbang dan didanai dengan APBD. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi merupakan kewenangan Kemantren dan Kelurahan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian, kebudayaan, kesejahteraan masyarakat, sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan permasalahan sosial di wilayah, perekonomian, pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pelayanan, informasi, dan pengaduan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah, pemerintah pusat menambah alokasi dana untuk masing-masing kelurahan. Pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Tambahan (DAU Tambahan) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwasanya DAU Tambahan dapat dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Pembangunan Sarana Prasarana penunjang wilayah. Mulai Tahun 2021, Alokasi DAU Tambahan melebur pada APBD yang mana melekat pada pagu kegiatan di masing-masing Kelurahan.

Di dalam perencanaan kegiatan, Kemantren Mantrijeron selalu melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal itu senyampang dengan mekanisme Bottom Up yang selalu menjadi roh perencanaan di wilayah serta diintegrasikan dengan perencanaan politis yaitu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan perencanaan birokratis (Program dan Kegiatan OPD-OPD terkait). Seluruh perwakilan kelompok masyarakat dilibatkan dalam menyampaikan kebutuhan kegiatan yang ditampung serta diputuskan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang pun dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Kampung, Kelurahan, kemudian sampai dengan tingkat Kemantren.

Dalam pelaksanaannya, Kemantren dan Kelurahan masih perlu mendampingi masyarakat untuk dapat memetakan kebutuhan pelatihan/sosialisasi yang dapat menambah keberdayaan masyarakat itu sendiri. Salah satu fokus yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kegiatan ini mencakup pelatihan pemilahan sampah rumah tangga, pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, pengelolaan bank sampah, serta peningkatan kesadaran lingkungan melalui kampanye dan edukasi. Dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang, lingkungan menjadi lebih bersih, serta tercipta peluang ekonomi baru melalui pengolahan sampah bernilai tambah.

Sehingga nantinya output dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa terlihat lebih nyata, baik dalam peningkatan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat, penguatan kehidupan sosial budaya, ketertiban masyarakat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, maupun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan Sarana Prasarana di wilayah Kemantren Mantrijeron diusulkan melalui Mekanisme Musrenbang dan didanai dengan APBD. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana di wilayah dilaksanakan oleh Kelurahan. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana yang difasilitasi merupakan kewenangan Kelurahan. Mekanisme Pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Di dalam perencanaan kegiatan, Kemantren Mantrijeron selalu melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal itu senyampang dengan mekanisme Bottom Up yang selalu menjadi roh perencanaan di wilayah serta diintegrasikan dengan perencanaan politis yaitu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan perencanaan birokratis (Program dan Kegiatan OPD-OPD terkait). Seluruh

perwakilan kelompok masyarakat dilibatkan dalam menyampaikan kebutuhan kegiatan yang ditampung serta diputuskan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang pun dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Kampung, Kelurahan, kemudian sampai dengan tingkat Kemantren.

Dalam pelaksanaannya, Kemantren dan Kelurahan masih perlu mendampingi masyarakat untuk dapat memetakan kebutuhan sarana prasarana yang dapat menunjang pembangunan kewilayahan itu sendiri. Salah satu bidang yang menjadi prioritas adalah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, seperti pembuatan Biopori Jumbo dan Biopori berbasis Rumah Tangga, fasilitas pemilahan sampah di tingkat RT/RW, dan sarana pengangkutan yang memadai. Upaya ini dilengkapi dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, baik melalui pelatihan pengomposan, pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai jual, maupun pembentukan dan penguatan bank sampah.

Dengan adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, diharapkan kebersihan lingkungan dapat terjaga, beban TPA dapat berkurang, serta tercipta peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sehingga nantinya output dari kegiatan pembangunan kewilayahan tersebut bisa terlihat lebih nyata dalam rangka meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat, kehidupan sosial budaya, ketertiban masyarakat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan. Partisipasi dan konstribusi masyarakat dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada

paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Mantrijeron. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Untuk lebih menekan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan maka Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta mengambil langkah kebijakan yaitu:

a. Menyusun angaran berbasis gender dengan *Gender Analisys Pathway* (GAP*)* dan *Gender Budget Statement* (GBS*)* sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

b. Pembentukan, pengukuhan dan operasionalisasi Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Inisiasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam (IVA) oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kemantren Mantrijeron dan difasilitasi oleh Kemantren Mantrijeron bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan dan Karang Taruna.

d. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana dengan intervensi kegiatan :

    1) Mewujudkan keluarga sehat PUS (Pasangan Usia Subur).

    2) Edukasi terkait IMS (Infeksi Menular Seksual).

    3) Pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada PUS yang beresiko.

    4) Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

e. Peningkatan peran serta masyarakat baik sebagai Pengurus maupun donator.

f. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

g. Penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA).

h. Penguatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemantren (TKSK) dan fasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) baik bersumber dari APBD Kota Yogyakarta, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta maupun APBN.

i. Pelaksanaan Gebyar PAUD, Gebyar Lansia dan Gelar Disabilitas yang melibatkan berbagai unsur anak-anak, pemuda, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok disabilitas.

5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Pertumbuhan perekonomian di sektor usaha pariwisata dan UMKM

(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah salah satu aspek kehidupan yang cukup berdampak besar akibat dinamika global. Perubahan tren pasar, persaingan yang semakin ketat, serta tantangan pasca pandemi menuntut adanya solusi kreatif dan adaptif. Salah satunya adalah dengan menciptakan ekosistem digital yang mendukung keberlangsungan usaha. Aktivitas belanja secara daring, pemasaran berbasis media sosial, dan peningkatan kecakapan digital menjadi solusi cepat agar UMKM dapat bertahan, berkembang, dan bersaing di era modern.

Guna ikut mencari solusi dalam rangka ikut membangkitkan perekonomian masyarakat, Kemantren Mantrijeron berusaha mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada. Salah satunya dengan menghadirkan MJ in Virtual Catalog. MJ in Virtual Catalog merupakan *e-Katalog* yang memuat produk UMKM yang tergabung di Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Mantrijeron. Dengan produk utama berupa foto dan video berkualitas tinggi yang memberikan *storytelling* untuk konsumennya, *e-Katalog* ini disempurnakan dengan *copywriting* persuasif dan dipublikasi melalui media sosial dan website. Kehadiran MJ in Virtual Catalog telah meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pemasaran visual dan strategi promosi yang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan omzet, perluasan jaringan konsumen, dan percepatan pemulihan ekonomi lokal.

Selain inovasi digital, Kemantren Mantrijeron secara rutin menyelenggarakan Gelar Expo UMKM, baik di tingkat kemantren maupun kelurahan. Kegiatan ini menjadi sarana promosi langsung, mempertemukan pelaku UMKM dengan calon konsumen dan mitra usaha. Melalui Gelar Expo, diharapkan UMKM semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jejaring, dan menjangkau pasar baru, sementara masyarakat mendapatkan akses lebih mudah untuk mengenal dan membeli produk-produk unggulan wilayah.

Kemantren Mantrijeron juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan. Program ini dilengkapi dengan pembinaan pengelolaan limbah usaha dan pemanfaatan bahan ramah lingkungan, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan strategi yang memadukan inovasi digital, promosi langsung, dan penguatan kapasitas usaha, diharapkan perekonomian masyarakat Kemantren Mantrijeron dapat terus tumbuh secara inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global.

6. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Penerapan keterbukaan publik yang sudah dilakukan di Kemantren

Mantrijeron adalah pengelolaan web Kemantren dengan alamat mantrijeronkec.jogjakota.go.id yang berisi informasi terkait Kemantren Mantrijeron keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang diperbarui secara rutin. Pada Tahun 2024 ini Kemantren Mantrijeron tetap mengemas informasi dalam 1 (satu) wadah inovasi bertajuk "Jesica Maron" (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron), dengan dibuatkan satu wadah tersebut diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait Kemantren Mantrijeron hanya dengan 1 (satu) kali klik.

Guna memudahkan akses informasi terkait penataan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sarilaya, Kemantren Mantrijeron menghadirkan inovasi "Mantra Sarilaya" (Makam Aman dan Tertata Rapi di TPU Sarilaya). Penataan yang dilakukan baik kondisi fisik di lingkungan TPU Sarilaya, maupun pendataan dan pengelolaan data makam. Inovasi ini mendukung dilakukannya pengembangan di Tahun 2023 berupa legerisasi dan pemetaan ulang Makam Sarilaya yang masih digunakan hingga Tahun 2024 ini.

Inovasi "MJ in Virtual Catalog" juga Kemantren Mantrijeron hadirkan guna mempermudah akses jual beli dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. MJ in Virtual Catalog ini merupakan e-Katalog yang memuat produk UMKM yang tergabung di Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Mantrijeron melalui media digital yaitu Website dan Instagram. Tahun 2024 pada inovasi MJ in Virtual Catalog kembali dilakukan pengembangan melalui penambahan konten terkait Bank Sampah untuk mendukung Program Zero Sampah dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui informasi pada leaflet dan papan pengumuman, layanan komunikasi dan informasi melalui whatsapp di nomor Whatsapp Pelayanan Kemantren Mantrijeron pada nomor 085600064191, whatsapp Kelurahan Gedongkiwo 0821-3563-0255, whatsapp Kelurahan Suryodiningratan 0852-2999-2224, whatsapp Kelurahan Mantrijeron 0813-8682-7332, serta penyebarluasan informasi melalui media sosial Facebook dan Youtube.

Pada Tahun 2024 sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 003/XII/KIDDIY-KEP/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, Kemantren Mantrijeron dalam kategori Kapanewon/Kemantren mendapatkan nilai 91 dengan kualifikasi Informatif dan merupakan Terbaik Ke-3. Penghargaan ini sudah diperoleh Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 dan semoga masih bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut.

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

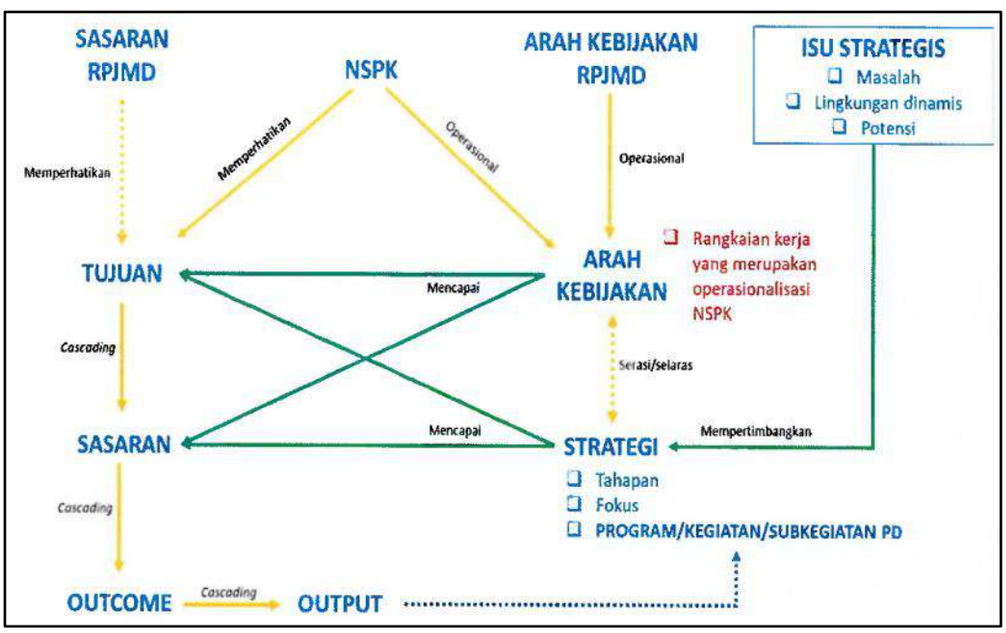

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

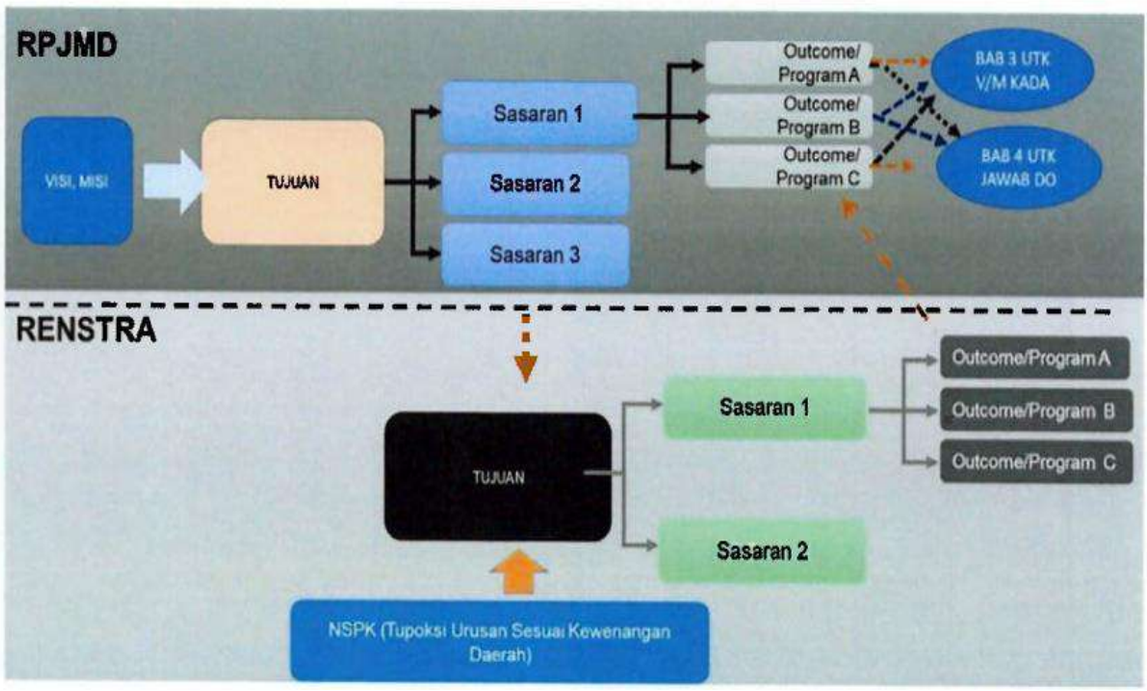

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren. Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron		Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron (Poin)	387,8 Poin	394,4 Poin	398,87 Poin	404,4 Poin	409,4 Poin	409,6 Poin
1.1			Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron (Poin)	386 Poin	394 Poin	399,33 Poin	406 Poin	412 Poin	412 Poin
1.2			Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mantrijeron yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron (Nilai)	A (88,88 - 90,00) Nilai	A (88,89 - 90,00) Nilai	A (88,90- 90,00) Nilai	A (88,91 - 90,00) Nilai	A (88,92 - 90,00) Nilai	A (88,93 - 90,00) Nilai

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam konteks perencanaan daerah, RPJMD berperan sebagai dokumen strategis yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat serangkaian program dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi visi dalam RPJMD dituangkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah.

Visi yang dimuat dalam RPJMD bersumber dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran di KPUD pada saat pemilihan kepala daerah. Visi ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin diwujudkan dalam masa kepemimpinan lima tahun dan menjadi acuan penerjemahan ke dalam kebijakan yang lebih konkret sehingga menghasilkan dokumen pembangunan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan serta mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah: "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**"

Visi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 "**Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan**".

Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**" akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan.
2. Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari.
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945.
5. Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY.

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangan menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan

Berkeadaban" memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Penahapan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029. Implementasi penahapan pembangunan di Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tetap memperhatikan prioritas usulan masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang setiap tahun dilaksanakan.

Lokus Pembangunan

Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam RPJMD 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan lokus Pembangunan Prioritas dalam RPJMD 2025-2029, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta termasuk dalam lokus Kawasan Sumbu Filosofi dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai.

1) Kawasan Sumbu Filosofi

Kawasan Sumbu Filosofi yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2023, memiliki posisi strategis sebagai struktur ruang utama dan pusat Kota Yogyakarta. Penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia membawa tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan budaya dan sejarah kota, serta mengatur perkembangan kawasan ini agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian nilai-nilai warisan budaya.

Penetapan ini tentu saja mengandung beberapa konsekuensi besar yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan Permasalahan Regulasi, Dampak Sosial Penataan Sumbu Filosofi, Transportasi dan Lalu Lintas, serta Penataan Infrastruktur.

Penetapan juga membawa dampak signifikan bagi wilayah yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, termasuk Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, Kemantren memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kewilayahan berbasis kearifan lokal dan pelibatan masyarakat. Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tidak bertindak sebagai pengambil kebijakan utama, namun memiliki peran koordinatif, fasilitatif, dan partisipatif yang sangat penting agar kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai

Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan mengedepankan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan

kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penanganan kawasan kumuh akan dilakukan dengan pemugaran dan peremajaan kawasan, menggunakan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

Implementasi konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan pendekatan M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) dan konsolidasi lahan, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memiliki peran penting sebagai fasilitator pembangunan berbasis wilayah yang berpihak pada masyarakat. Meskipun kewenangan teknis berada di tingkat kota, Kemantren adalah ujung tombak pelaksanaan di tingkat lokal. Peran ini harus dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan humanis, agar transformasi kawasan kumuh tidak menjadi beban sosial, melainkan peluang untuk membangun kota yang inklusif, sehat, dan berkeadilan.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuandan sasaran Renstra PD.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi :	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban			
Misi 3 :	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal			
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren	1. Meningkatkan pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mantrijeron 2. Meningkatkan Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	
		2. Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	3) Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4) Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5) Meningkatkan sarana prasarana Kewilayahan Terbangun 6) Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan 7) Meningkatkan peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan 8) Meningkatkan peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan 9) Meningkatkan peran serta lembaga sosial	

			kemasyarakatan dalam proses pembangunan 10) Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	
		3. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	1. Meningkatkan operasi ketertiban 2. Meningkatkan koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	
		4. Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	1. Meningkatkan koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 2. Meningkatkan Sinergitas Forkompimtren	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Selain itu, perencanaan program tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga harus memastikan kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk tahun 2030, menjadi landasan bagi penyusunan RKPD 2030 yang akan diterapkan oleh kepala daerah periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik.

Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 baik indikator sasaran maupun program. Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

4) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD

7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron

2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mantrijeron

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan

4) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Suryodiningratan

5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo

6) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gedongkiwo

7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

8) Evaluasi Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan :

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Sub Kegiatan :

1) Gelar Budaya Jogja

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Kegiatan :

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Sub Kegiatan :

1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren Mantrijeron)
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Mantrijeron)
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Suryodiningratan)
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Gedongkiwo)

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

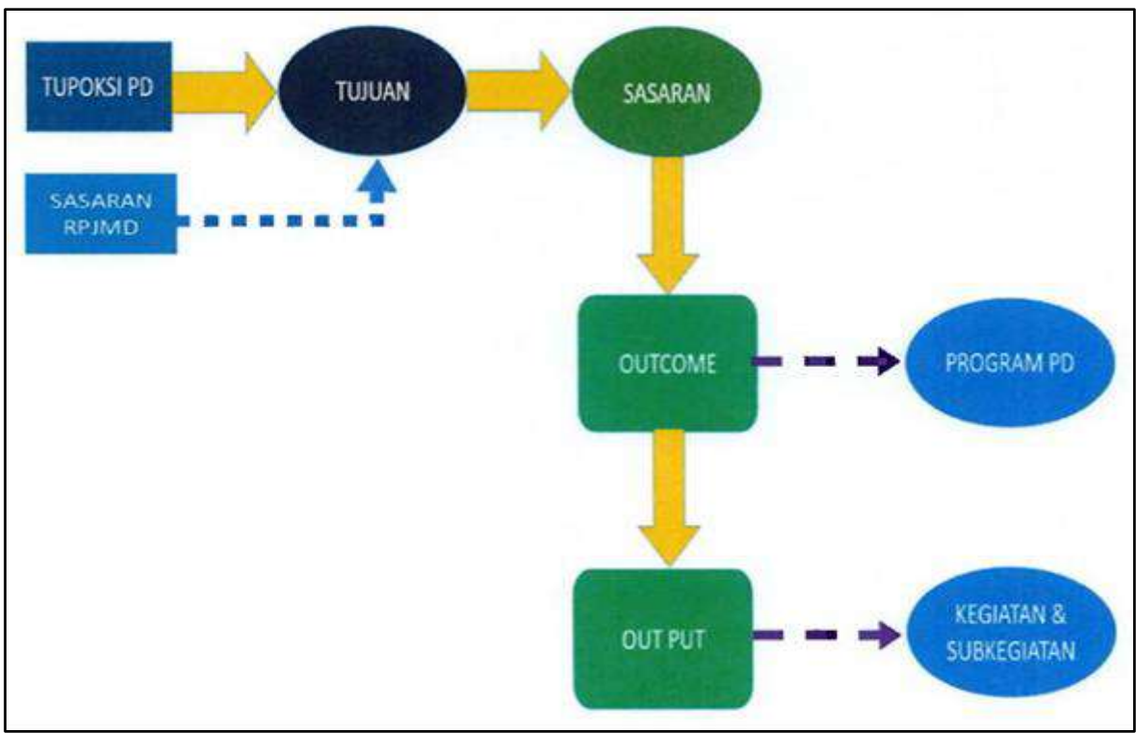

Berdasarkan kerangka di atas, Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron				1. Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron (Poin)		
		1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron			1.1 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron (Poin)		
			1.1.1 Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mantrijeron		1.1.1 Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				1.1.1.1 Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mantrijeron	1.1.1.1 Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik (%)	1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						1.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				1.1.1.2 Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	1.1.1.2 Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (%)	1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
						1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
						1.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			1.1.2 Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat		1.1.2 Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				1.1.2.1 Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.1.2.1 Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (lembaga)	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				1.1.2.2 Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.1.2.2.1 Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (dokumen) 1.1.2.2.2 Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (dokumen)	2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						2.2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						2.2.2 Evaluasi Kelurahan	
				1.1.2.3.1 Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	1.1.2.3.1 Persentase sarana prasarana terbangun (%)	2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gedongkiwo	
				1.1.2.3.2 Meningkatnya fasilitasi	1.1.2.3.2 Persentase fasilitasi pemberdayaan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemberdayaan masyarakat kelurahan	masyarakat kelurahan (%)		
						2.3.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo	
						2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongkiwo	
				1.1.2.4.1 Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	1.1.2.4.1 Persentase sarana prasarana terbangun (%)	2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryodiningratan	
				1.1.2.4.2 Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	1.1.2.4.2 Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)		
						2.4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan	
						2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1.1.2.5.1 Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	1.1.2.5.1 Persentase sarana prasarana terbangun (%)	2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mantrijeron	
				1.1.2.5.2 Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	1.1.2.5.2 Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)		
						2.5.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron	
						2.5.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mantrijeron	
				1.1.2.6.1 Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	1.1.2.6.1 Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)	2.6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				1.1.2.6.1 Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan	1.1.2.6.1 Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dalam proses pembangunan	pembangunan (%)		
						2.6.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
						2.6.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				1.1.2.7.1 Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	1.1.2.7.1 Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (%)	2.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				1.1.2.7.2 Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	1.1.2.7.2 Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan (%)		
				1.1.2.7.3 Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	1.1.2.7.3 Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana (%)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2.7.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
						2.7.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
						2.7.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
						2.7.4 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
						2.7.5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			1.1.3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mantrijeron		1.1.3 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (%)	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				1.1.3.1	1.1.3.1 Persentase	3.1 Koordinasi Penerapan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya operasi ketertiban	operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						3.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			1.1.4 Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron		1.1.4 Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (%)	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				1.1.4.1 Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1.1.4.1 Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (%)	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				1.1.4.2 Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	1.1.4.2 Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan (%)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
						4.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			1.1.5 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)		1.1.5 Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
				1.1.5.1 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.1.5.1 Jumlah Laporan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (laporan)	5.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
						5.1.1 Gelar Budaya Jogja	
			1.1.6 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan			6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)			Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
				1.1.6.1 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)	1.1.6.1 Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (laporan)	6.1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)	
						6.1.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren Mantrijeron)	
				1.1.6.2 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan	1.1.6.2 Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (laporan)	6.2 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Gedongkiwo)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Gedongkiwo)			
						6.2.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Gedongkiwo)	
				1.1.6.3 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Suryodiningratan)	1.1.6.3 Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (laporan)	6.3 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Suryodiningratan)	
						6.3.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Suryodiningratan)	
				1.1.6.4 Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan	1.1.6.4 Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	6.4 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Mantrijeron)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Mantrijeron)	(laporan)		
						6.4.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Mantrijeron)	
		1.2. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mantrijeron yang Baik dan Adaptif			1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron (Nilai)		
			1.2.7 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mantrijeron		1.2.7.1 Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					1.2.7.2 Nilai SPIP Kemantren		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Mantrijeron (Nilai)		
					1.2.7.3 Nilai IKM Kemantren Mantrijeron (Nilai)		
				1.2.7.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	1.2.7.1 Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron (%) 1.2.7.2 Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Mantrijeron (%)	7.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						7.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						7.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						7.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						7.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						7.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						7.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				1.2.7.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	1.2.7.2 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						7.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						7.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						7.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						7.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						7.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeriksaan	
						7.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						7.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				1.2.7.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	1.2.7.3 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						7.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						7.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						7.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						7.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						7.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Milik Daerah pada SKPD	
						7.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						7.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				1.2.7.4 Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	1.2.7.4 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						7.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						7.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				1.2.7.5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	1.2.7.5 Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						7.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						7.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						7.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						7.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				1.2.7.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	1.2.7.6 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	7.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						7.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				1.2.7.7 Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	1.2.7.7 Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Mantrijeron (%)	7.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						7.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						7.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						7.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				1.2.7.8	1.2.7.8 Nilai	7.8 Pemeliharaan Barang Milik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						7.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						7.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						7.8.3 Pemeliharaan Mebel	
						7.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						7.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Adapun Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	30.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gedongkiwo)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Gedongkiwo)	Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Mantrijeron)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Mantrijeron)	Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Suryodiningratan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kelurahan Suryodiningratan)	Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Kemantren Mantrijeron)	Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01 - KECAMATAN				7.913.972.534,00		11.763.852.194,00		12.003.121.152,00		12.307.782.699,00		12.642.377.710,00		13.077.723.040,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.064.344.934,00		6.464.607.341,00		6.596.093.171,00		6.763.514.287,00		6.947.384.785,00		7.186.620.757,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mantrijeron	Nilai IKM Kemantren Mantrijeron (Nilai)	85.11	85,11	7.064.344.934,00	85.20	6.464.607.341,00	85.25	6.596.093.171,00	85.30	6.763.514.287,00	85.35	6.947.384.785,00	85.4	7.186.620.757,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
	Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
	Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.345.000,00		23.460.000,00		23.937.176,00		24.544.702,00		25.212.072,00		26.080.377,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron (Persentase)	100	100	23.345.000,00	100	23.460.000,00	100	23.937.176,00	100	24.544.702,00	100	25.212.072,00	100	26.080.377,00		
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Mantrijeron (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.095.000,00		6.900.000,00		7.040.346,00		7.219.030,00		7.415.315,00		7.670.699,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	6.095.000,00	4	6.900.000,00	4	7.040.346,00	4	7.219.030,00	4	7.415.315,00	4	7.670.699,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.380.000,00		1.380.000,00		1.408.069,00		1.443.806,00		1.483.063,00		1.534.140,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.380.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.069,00	1	1.443.806,00	1	1.483.063,00	1	1.534.140,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.380.000,00		1.380.000,00		1.408.069,00		1.443.806,00		1.483.063,00		1.534.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.380.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.069,00	1	1.443.806,00	1	1.483.063,00	1	1.534.140,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				690.000,00		1.380.000,00		1.408.069,00		1.443.806,00		1.483.063,00		1.534.140,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	690.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.069,00	1	1.443.806,00	1	1.483.063,00	1	1.534.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				690.000,00		1.380.000,00		1.408.069,00		1.443.806,00		1.483.063,00		1.534.140,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	690.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.069,00	1	1.443.806,00	1	1.483.063,00	1	1.534.140,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.970.000,00		7.590.000,00		7.744.381,00		7.940.933,00		8.156.847,00		8.437.769,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	8.970.000,00	4	7.590.000,00	4	7.744.381,00	4	7.940.933,00	4	8.156.847,00	4	8.437.769,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.140.000,00		3.450.000,00		3.520.173,00		3.609.515,00		3.707.658,00		3.835.349,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		4.140.000,00	1	3.450.000,00	1	3.520.173,00	1	3.609.515,00	1	3.707.658,00	1	3.835.349,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.535.962.000,00		4.860.399.999,00		4.959.256.249,00		5.085.134.448,00		5.223.369.797,00		5.403.230.691,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	5	5	5.535.962.000,00	5	4.860.399.999,00	5	4.959.256.249,00	5	5.085.134.448,00	5	5.223.369.797,00	5	5.403.230.691,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.527.406.000,00		4.852.809.999,00		4.951.511.867,00		5.077.193.517,00		5.215.212.949,00		5.394.792.921,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	5.527.406.000,00	30	4.852.809.999,00	30	4.951.511.867,00	30	5.077.193.517,00	30	5.215.212.949,00	30	5.394.792.921,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.656.000,00		1.380.000,00		1.408.069,00		1.443.806,00		1.483.063,00		1.534.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.656.000,00	12	1.380.000,00	12	1.408.069,00	12	1.443.806,00	12	1.483.063,00	12	1.534.140,00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.070.000,00		1.725.000,00		1.760.087,00		1.804.757,00		1.853.829,00		1.917.675,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	2.070.000,00	12	1.725.000,00	12	1.760.087,00	12	1.804.757,00	12	1.853.829,00	12	1.917.675,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				920.000,00		920.000,00		938.713,00		962.537,00		988.709,00		1.022.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	920.000,00	1	920.000,00	1	938.713,00	1	962.537,00	1	988.709,00	1	1.022.760,00		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				920.000,00		920.000,00		938.713,00		962.537,00		988.709,00		1.022.760,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	920.000,00	1	920.000,00	1	938.713,00	1	962.537,00	1	988.709,00	1	1.022.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.070.000,00		1.725.000,00		1.760.087,00		1.804.757,00		1.853.829,00		1.917.675,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	2.070.000,00	12	1.725.000,00	12	1.760.087,00	12	1.804.757,00	12	1.853.829,00	12	1.917.675,00		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis				920.000,00		920.000,00		938.713,00		962.537,00		988.709,00		1.022.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Realisasi Anggaran																
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	920.000,00	1	920.000,00	1	938.713,00	1	962.537,00	1	988.709,00	1	1.022.760,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.120.000,00		5.240.000,00		5.346.581,00		5.482.279,00		5.631.340,00		5.825.285,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	5	5	10.120.000,00	5	5.240.000,00	5	5.346.581,00	5	5.482.279,00	5	5.631.340,00	5	5.825.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				920.000,00		440.000,00		448.950,00		460.344,00		472.861,00		489.146,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000,00	1	440.000,00	1	448.950,00	1	460.344,00	1	472.861,00	1	489.146,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				920.000,00		460.000,00		469.356,00		481.269,00		494.354,00		511.380,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000,00	1	460.000,00	1	469.356,00	1	481.269,00	1	494.354,00	1	511.380,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				920.000,00		460.000,00		469.356,00		481.269,00		494.354,00		511.380,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	920.000,00	1	460.000,00	1	469.356,00	1	481.269,00	1	494.354,00	1	511.380,00		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				460.000,00		220.000,00		224.475,00		230.172,00		236.430,00		244.573,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	460.000,00	1	220.000,00	1	224.475,00	1	230.172,00	1	236.430,00	1	244.573,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.060.000,00		2.760.000,00		2.816.138,00		2.887.612,00		2.966.126,00		3.068.280,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11	5.060.000,00	11	2.760.000,00	11	2.816.138,00	11	2.887.612,00	11	2.966.126,00	11	3.068.280,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				920.000,00		460.000,00		469.356,00		481.269,00		494.354,00		511.380,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	920.000,00	1	460.000,00	1	469.356,00	1	481.269,00	1	494.354,00	1	511.380,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				920.000,00		440.000,00		448.950,00		460.344,00		472.861,00		489.146,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	920.000,00	1	440.000,00	1	448.950,00	1	460.344,00	1	472.861,00	1	489.146,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.510.000,00		6.325.000,00		6.453.651,00		6.617.444,00		6.797.373,00		7.031.474,00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mantrijeron (Nilai)	85,10	85,11	8.510.000,00	85,12	6.325.000,00	85,13	6.453.651,00	85,14	6.617.444,00	85,15	6.797.373,00	85,16	7.031.474,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.300.000,00		1.150.000,00		1.173.391,00		1.203.172,00		1.235.886,00		1.278.450,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	2.300.000,00	1	1.150.000,00	1	1.173.391,00	1	1.203.172,00	1	1.235.886,00	1	1.278.450,00		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6.210.000,00		5.175.000,00		5.280.260,00		5.414.272,00		5.561.487,00		5.753.024,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	6.210.000,00	1	5.175.000,00	1	5.280.260,00	1	5.414.272,00	1	5.561.487,00	1	5.753.024,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.329.615,00		153.262.435,00		156.379.794,00		160.348.711,00		164.708.593,00		170.381.158,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren	88,82	88,83	183.329.615,00	88,84	153.262.435,00	88,85	156.379.794,00	88,86	160.348.711,00	88,87	164.708.593,00	88,88	170.381.158,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Mantrijeron (Nilai)															
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.366.390,00		16.229.380,00		16.559.486,00		16.979.765,00		17.441.445,00		18.042.129,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	13.366.390,00	4	16.229.380,00	4	16.559.486,00	4	16.979.765,00	4	17.441.445,00	4	18.042.129,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.231.425,00		60.438.455,00		61.667.773,00		63.232.901,00		64.952.204,00		67.189.158,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	63.231.425,00	4	60.438.455,00	4	61.667.773,00	4	63.232.901,00	4	64.952.204,00	4	67.189.158,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.794.600,00		11.385.100,00		11.616.673,00		11.911.504,00		12.235.378,00		12.656.764,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	6.794.600,00	4	11.385.100,00	4	11.616.673,00	4	11.911.504,00	4	12.235.378,00	4	12.656.764,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.707.200,00		27.207.500,00		27.760.901,00		28.465.472,00		29.239.448,00		30.246.455,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	25.707.200,00	4	27.207.500,00	4	27.760.901,00	4	28.465.472,00	4	29.239.448,00	4	30.246.455,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.230.000,00		38.002.000,00		38.774.961,00		39.759.069,00		40.840.118,00		42.246.652,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	74.230.000,00	4	38.002.000,00	4	38.774.961,00	4	39.759.069,00	4	40.840.118,00	4	42.246.652,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.920.603,00		110.502.056,00		112.749.668,00		115.611.254,00		118.754.724,00		122.844.637,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	5	5	275.920.603,00	5	110.502.056,00	5	112.749.668,00	5	115.611.254,00	5	118.754.724,00	5	122.844.637,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				275.920.603,00		110.502.056,00		112.749.668,00		115.611.254,00		118.754.724,00		122.844.637,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22	22	275.920.603,00	11	110.502.056,00	11	112.749.668,00	11	115.611.254,00	11	118.754.724,00	11	122.844.637,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				696.611.000,00		893.767.000,00		911.946.221,00		935.091.415,00		960.516.552,00		993.596.741,00		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Mantrijeron (Persentase)	100	100	696.611.000,00	100	893.767.000,00	100	911.946.221,00	100	935.091.415,00	100	960.516.552,00	100	993.596.741,00		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.100.000,00		3.163.054,00		3.243.332,00		3.331.519,00		3.446.256,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.100.000,00	12	3.163.054,00	12	3.243.332,00	12	3.331.519,00	12	3.446.256,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.400.000,00		152.400.000,00		155.499.816,00		159.446.401,00		163.781.749,00		169.422.392,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	104.400.000,00	12	152.400.000,00	12	155.499.816,00	12	159.446.401,00	12	163.781.749,00	12	169.422.392,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				589.571.000,00		738.267.000,00		753.283.351,00		772.401.682,00		793.403.284,00		820.728.093,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	589.571.000,00	12	738.267.000,00	12	753.283.351,00	12	772.401.682,00	12	793.403.284,00	12	820.728.093,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.546.716,00		411.650.851,00		420.023.831,00		430.684.034,00		442.394.334,00		457.630.394,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron (Nilai)	5	5	330.546.716,00	5	411.650.851,00	5	420.023.831,00	5	430.684.034,00	5	442.394.334,00	5	457.630.394,00		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.640.000,00		26.640.000,00		27.181.858,00		27.871.733,00		28.629.566,00		29.615.568,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.640.000,00	1	26.640.000,00	1	27.181.858,00	1	27.871.733,00	1	28.629.566,00	1	29.615.568,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.975.900,00		79.708.600,00		81.329.873,00		83.394.025,00		85.661.509,00		88.611.691,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17	79.975.900,00	17	79.708.600,00	17	81.329.873,00	17	83.394.025,00	17	85.661.509,00	17	88.611.691,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		2.975.000,00		3.035.512,00		3.112.553,00		3.197.183,00		3.307.294,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	5	-	5	2.975.000,00	5	3.035.512,00	5	3.112.553,00	5	3.197.183,00	5	3.307.294,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.925.000,00		73.790.000,00		75.290.889,00		77.201.771,00		79.300.888,00		82.032.010,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	47.925.000,00	21	73.790.000,00	21	75.290.889,00	21	77.201.771,00	21	79.300.888,00	21	82.032.010,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				176.005.816,00		228.537.251,00		233.185.699,00		239.103.952,00		245.605.188,00		254.063.831,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	176.005.816,00	2	228.537.251,00	4	233.185.699,00	4	239.103.952,00	4	245.605.188,00	4	254.063.831,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				219.694.700,00		199.459.000,00		203.515.864,00		208.681.475,00		214.354.616,00		221.736.003,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	115	115	219.694.700,00	116	199.459.000,00	116	203.515.864,00	117	208.681.475,00	118	214.354.616,00	118	221.736.003,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				126.575.700,00		105.340.000,00		107.482.483,00		110.210.768,00		113.206.489,00		117.104.336,00		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mantrijeron	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik (Persentase)	100	100	126.575.700,00	100	105.340.000,00	100	107.482.483,00	100	110.210.768,00	100	113.206.489,00	100	117.104.336,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				126.575.700,00		105.340.000,00		107.482.483,00		110.210.768,00		113.206.489,00		117.104.336,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	126.575.700,00	1	105.340.000,00	1	107.482.483,00	1	110.210.768,00	1	113.206.489,00	1	117.104.336,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				93.119.000,00		94.119.000,00		96.033.381,00		98.470.707,00		101.148.127,00		104.631.667,00		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (Persentase)	100	100	93.119.000,00	100	94.119.000,00	100	96.033.381,00	100	98.470.707,00	100	101.148.127,00	100	104.631.667,00		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				20.156.000,00		21.476.000,00		21.912.822,00		22.468.969,00		23.079.901,00		23.874.772,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	20.156.000,00	1	21.476.000,00	1	21.912.822,00	1	22.468.969,00	1	23.079.901,00	1	23.874.772,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				72.963.000,00		72.643.000,00		74.120.559,00		76.001.738,00		78.068.226,00		80.756.895,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	72.963.000,00	1	72.643.000,00	1	74.120.559,00	1	76.001.738,00	1	78.068.226,00	1	80.756.895,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				511.966.900,00		4.957.079.853,00		5.057.903.572,00		5.186.282.575,00		5.327.275.012,00		5.510.721.856,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	181.67	181.67	511.966.900,00	186	565.080.250,00	190	576.570.696,00	194	591.213.471,00	198	607.265.980,00	198	628.155.712,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				297.037.900,00		100.360.000,00		102.401.322,00		105.000.268,00		107.855.225,00		111.569.759,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	4	4	297.037.900,00	4	100.360.000,00	4	102.401.322,00	4	105.000.268,00	4	107.855.225,00	4	111.569.759,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				297.037.900,00		100.360.000,00		102.401.322,00		105.000.268,00		107.855.225,00		111.569.759,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	297.037.900,00	1	100.360.000,00	1	102.401.322,00	1	105.000.268,00	1	107.855.225,00	1	111.569.759,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				49.095.000,00		4.435.669.603,00		4.525.891.124,00		4.640.758.240,00		4.766.940.456,00		4.931.113.886,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (Dokumen)	4	4	49.095.000,00	4	43.670.000,00	4	44.558.248,00	4	45.689.136,00	4	46.931.424,00	4	48.547.742,00		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.585.000,00		37.950.000,00		38.721.903,00		39.704.665,00		40.784.235,00		42.188.844,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	40.585.000,00	25	37.950.000,00	25	38.721.903,00	25	39.704.665,00	25	40.784.235,00	25	42.188.844,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				8.510.000,00		5.720.000,00		5.836.345,00		5.984.471,00		6.147.189,00		6.358.898,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	8.510.000,00	3	5.720.000,00	3	5.836.345,00	3	5.984.471,00	3	6.147.189,00	3	6.358.898,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				104.688.000,00		132.310.250,00		134.998.154,00		138.433.818,00		142.175.248,00		147.047.256,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	100	100	102.733.000,00	100	82.864.750,00	100	84.550.219,00	100	86.696.104,00	100	89.053.371,00	100	92.120.369,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				102.733.000,00		82.864.750,00		84.550.219,00		86.696.104,00		89.053.371,00		92.120.369,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	102.733.000,00	1	82.864.750,00	1	84.550.219,00	1	86.696.104,00	1	89.053.371,00	1	92.120.369,00		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	100	100	1.955.000,00	100	49.445.500,00	100	50.447.935,00	100	51.737.714,00	100	53.121.877,00	100	54.926.887,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.955.000,00		49.445.500,00		50.447.935,00		51.737.714,00		53.121.877,00		54.926.887,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	1.955.000,00	4	49.445.500,00	4	50.447.935,00	4	51.737.714,00	4	53.121.877,00	4	54.926.887,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				61.146.000,00		288.740.000,00		294.612.972,00		302.090.249,00		310.304.083,00		320.990.955,00		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan	100	100	15.126.000,00	100	11.940.000,00	100	12.182.860,00	100	12.492.061,00	100	12.831.720,00	100	13.273.644,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	keluarga (Persentase)															
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				15.126.000,00		11.940.000,00		12.182.860,00		12.492.061,00		12.831.720,00		13.273.644,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	55	55	15.126.000,00	55	11.940.000,00	55	12.182.860,00	55	12.492.061,00	55	12.831.720,00	55	13.273.644,00		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana (Persentase)	100	100	14.520.000,00	100	30.400.000,00	100	31.018.336,00	100	31.805.581,00	100	32.670.375,00	100	33.795.543,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				14.520.000,00		30.400.000,00		31.018.336,00		31.805.581,00		32.670.375,00		33.795.543,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	55	55	14.520.000,00	55	30.400.000,00	55	31.018.336,00	55	31.805.581,00	55	32.670.375,00	55	33.795.543,00		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan (Persentase)	100	100	31.500.000,00	100	246.400.000,00	100	251.411.776,00	100	257.792.607,00	100	264.801.988,00	100	273.921.768,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang				2.155.000,00		201.915.000,00		206.021.951,00		211.250.788,00		216.994.697,00		224.467.995,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Berkualitas dan Berdaya Saing																
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	55	55	2.155.000,00	55	201.915.000,00	55	206.021.951,00	55	211.250.788,00	55	216.994.697,00	55	224.467.995,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				22.880.000,00		17.735.000,00		18.095.730,00		18.555.000,00		19.059.510,00		19.715.919,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	55	55	22.880.000,00	55	17.735.000,00	55	18.095.730,00	55	18.555.000,00	55	19.059.510,00	55	19.715.919,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan				6.465.000,00		26.750.000,00		27.294.095,00		27.986.819,00		28.747.781,00		29.737.854,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Menuju Keluarga Berkualitas																
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	55	55	6.465.000,00	55	26.750.000,00	55	27.294.095,00	55	27.986.819,00	55	28.747.781,00	55	29.737.854,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mantrijeron (Kelurahan Gedongkiwo)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	181.67	181.67	1.310.793.368,00	186	1.521.804.400,00	190	1.552.757.901,00	194	1.592.166.897,00	198	1.635.457.915,00	198	1.691.783.085,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.722.457.886,00		4.435.669.603,00		4.525.891.124,00		4.640.758.240,00		4.766.940.456,00		4.931.113.886,00		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	100	100	785.417.600,00	100	1.017.841.400,00	100	1.038.544.294,00	100	1.064.902.548,00	100	##########	100	1.131.529.692,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				785.417.600,00		1.017.841.400,00		1.038.544.294,00		1.064.902.548,00		1.093.857.249,00		1.131.529.692,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	129	129	785.417.600,00	135	1.017.841.400,00	135	1.038.544.294,00	135	1.064.902.548,00	135	1.093.857.249,00	135	1.131.529.692,00		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	100	100	525.375.768,00	100	503.963.000,00	100	514.213.607,00	100	527.264.349,00	100	541.600.666,00	100	560.253.393,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				525.375.768,00		503.963.000,00		514.213.607,00		527.264.349,00		541.600.666,00		560.253.393,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12	12	525.375.768,00	11	503.963.000,00	11	514.213.607,00	11	527.264.349,00	11	541.600.666,00	11	560.253.393,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mantrijeron (Kelurahan Mantrijeron)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	181.67	181.67	1.273.833.768,00	186	1.553.671.450,00	190	1.585.273.128,00	194	1.625.507.360,00	198	1.669.704.904,00	198	1.727.209.542,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.722.457.886,00		4.435.669.603,00		4.525.891.124,00		4.640.758.240,00		4.766.940.456,00		4.931.113.886,00		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	100	100	613.334.350,00	100	1.022.790.450,00	100	1.043.594.008,00	100	1.070.080.424,00	100	1.099.175.910,00	100	1.137.031.529,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				613.334.350,00		1.022.790.450,00		1.043.594.008,00		1.070.080.424,00		1.099.175.910,00		1.137.031.529,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	119	119	613.334.350,00	115	1.022.790.450,00	115	1.043.594.008,00	115	1.070.080.424,00	115	1.099.175.910,00	115	1.137.031.529,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	100	100	660.499.418,00	100	530.881.000,00	100	541.679.120,00	100	555.426.936,00	100	570.528.994,00	100	590.178.013,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				660.499.418,00		530.881.000,00		541.679.120,00		555.426.936,00		570.528.994,00		590.178.013,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	660.499.418,00	8	530.881.000,00	8	541.679.120,00	8	555.426.936,00	8	570.528.994,00	8	590.178.013,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mantrijeron (Kelurahan Suryodiningratan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	181.67	181.67	1.137.830.750,00	186	1.316.523.753,00	190	1.343.301.847,00	194	1.377.394.847,00	198	1.414.846.213,00	198	1.463.573.517,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.722.457.886,00		4.435.669.603,00		4.525.891.124,00		4.640.758.240,00		4.766.940.456,00		4.931.113.886,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persentase)	100	100	620.007.750,00	100	829.922.400,00	100	846.803.022,00	100	868.294.882,00	100	891.903.820,00	100	922.620.988,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				620.007.750,00		829.922.400,00		846.803.022,00		868.294.882,00		891.903.820,00		922.620.988,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	116	116	620.007.750,00	123	829.922.400,00	123	846.803.022,00	123	868.294.882,00	123	891.903.820,00	123	922.620.988,00		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Persentase)	100	100	517.823.000,00	100	486.601.353,00	100	496.498.825,00	100	509.099.965,00	100	522.942.393,00	100	540.952.529,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				517.823.000,00		486.601.353,00		496.498.825,00		509.099.965,00		522.942.393,00		540.952.529,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	11	11	517.823.000,00	10	486.601.353,00	10	496.498.825,00	10	509.099.965,00	10	522.942.393,00	10	540.952.529,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.078.000,00		54.132.000,00		55.233.009,00		56.634.926,00		58.174.583,00		60.177.848,00		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mantrijeron	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	43.078.000,00	100	54.132.000,00	100	55.233.009,00	100	56.634.926,00	100	58.174.583,00	100	60.177.848,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				43.078.000,00		54.132.000,00		55.233.009,00		56.634.926,00		58.174.583,00		60.177.848,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP (Persentase)	100	100	43.078.000,00	100	54.132.000,00	100	55.233.009,00	100	56.634.926,00	100	58.174.583,00	100	60.177.848,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				43.078.000,00		54.132.000,00		55.233.009,00		56.634.926,00		58.174.583,00		60.177.848,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	43.078.000,00	4	54.132.000,00	4	55.233.009,00	4	56.634.926,00	4	58.174.583,00	4	60.177.848,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				74.888.000,00		88.574.000,00		90.375.536,00		92.669.436,00		95.188.714,00		98.466.576,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	78	78	74.888.000,00	79	88.574.000,00	80	90.375.536,00	81	92.669.436,00	82	95.188.714,00	83	98.466.576,00	7.01.4.01.2.22.08.0000 - Kemantren Mantrijeron	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				74.888.000,00		88.574.000,00		90.375.536,00		92.669.436,00		95.188.714,00		98.466.576,00		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Persentase)	100	100	9.385.000,00	100	29.030.000,00	100	29.620.470,00	100	30.372.238,00	100	31.198.059,00	100	32.272.520,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				9.385.000,00		29.030.000,00		29.620.470,00		30.372.238,00		31.198.059,00		32.272.520,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40	9.385.000,00	115	29.030.000,00	115	29.620.470,00	115	30.372.238,00	115	31.198.059,00	115	32.272.520,00		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	65.503.000,00	100	59.544.000,00	100	60.755.066,00	100	62.297.198,00	100	63.990.655,00	100	66.194.056,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				65.503.000,00		59.544.000,00		60.755.066,00		62.297.198,00		63.990.655,00		66.194.056,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	65.503.000,00	2	59.544.000,00	2	60.755.066,00	2	62.297.198,00	2	63.990.655,00	2	66.194.056,00		

4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana;
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian; dan
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda.

2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat;
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan.

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga;
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata;
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi;
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin;
   b. Kampung Layak Huni; dan

c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan;

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan;
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat;
   d. Mengembangkan tata ruang keistimewaan;
   e. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan; dan
   f. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah;
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan; dan
   c. Jogja Tangguh Bencana.

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan b. Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron 2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mantrijeron 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan 4) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Suryodiningratan 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo 6) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gedongkiwo 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8) Evaluasi Kelurahan c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
2	Pemajuan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : a. Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mantrijeron 2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Suryodiningratan 3) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gedongkiwo b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 1) Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Jogja Tangguh Bencana	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. IKU Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron	Poin	387,8 Poin	394,4 Poin	398,87 Poin	404,4 Poin	409,4 Poin	409,4 Poin	
1.1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Poin	386 Poin	394 Poin	399,33 Poin	406 Poin	412 Poin	412 Poin	
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Nilai	A (88,88 - 90,00) Nilai	A (88,89 - 90,00) Nilai	A (88,90-90,00) Nilai	A (88,91 - 90,00) Nilai	A (88,92 - 90,00) Nilai	A (88,93 - 90,00) Nilai	

1) Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron

Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron merupakan indikator kinerja dari tujuan OPD yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron. Target diperoleh dari perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.

Evaluasi kinerja kemantren dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan berasaskan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan sinergisitas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kemantren. Sasaran Evaluasi Kinerja Kemantren meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan tahapan:

a. sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren;
b. pengisian data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren secara mandiri melalui aplikasi “SI KEREN”;
c. penilaian verifikasi data dukung oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
d. penyampaian presentasi data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Mantri

Pamong Praja;

e. verifikasi dan klarifikasi lapangan data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
f. penyampaian hasil Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
g. penetapan Kemantren terbaik; dan
h. pengumuman Kemantren terbaik.

Penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren dilakukan dengan indikator penilaian yang meliputi aspek:

a. penyelenggaraan atributif;
b. penyelenggaraan tugas delegatif;
c. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum;
d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
e. tata kelola pemerintahan; dan/atau
f. inovasi, prestasi dan penghargaan.

1.1.) Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron. Target diperoleh dari perhitungan Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Nilai evaluasi perkembangan pembangunan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mengetahui tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan
   a. Pemerintahan Kelurahan;
   b. Kinerja;
   c. Inisiatif dan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat;
   b. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government; dan
   c. Pelestarian adat dan budaya.

2) Bidang Kewilayahan
   a. Identitas desa dan kelurahan;
   b. Batas;
   c. Inovasi;
   d. Tanggap dan siaga bencana; dan
   e. Pengaturan investasi.

3) Bidang Kemasyarakatan

a. Partisipasi masyarakat;
b. Lembaga Kemasyarakatan;
c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
d. Keamanan dan ketertiban;
e. Pendidikan;
f. Kesehatan;
g. Ekonomi;
h. Penanggulangan kemiskinan; dan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

1.2.) Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron

Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mantrijeron yang Baik dan Adaptif. Target diperoleh dari perhitungan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) parameter penilaian yaitu :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
4) Indeks Kepuasan Masyarakat
5) Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP
6) Indeks Profesionalitas (IP) ASN
7) Penilaian Pengawasan Arsip Internal
8) Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

Perangkat Daerah/ Unit Kerja leading sector melaksanakan penilaian terhadap parameter yang telah ditetapkan berdasar Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya. Mekanisme yang digunakan oleh Perangkat Daerah leading sector dalam melaksanakan masing-masing parameter penilaian mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian dari Perangkat Daerah leading sector disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir Oktober. Evaluator internal menyusun Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah kepada Wali Kota Yogyakarta dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta paling lambat bulan November.

Evaluator internal melakukan pembobotan atas hasil penilaian pada 8 (delapan) parameter. Hasil pembobotan menjadi nilai RB level Perangkat Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kategori dan Predikat Nilai Reformasi Birokrasi

No.	Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 – 100	AA	Istimewa
2.	>80 – 90	A	Sangat Baik
3.	>70 – 80	BB	Baik
4.	>60 – 70	B	Cukup Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup
6.	>30 – 50	C	Buruk
7.	>0 – 30	D	Sangat Buruk

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Resntra) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini disusun. Semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kemantren Kraton telah selesai disusun, yang mana Renstra Perangkat Daerah Kemantren Kraton merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusunlah Renstra Kemantren Kraton 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dalam menentukan arah, sasaran, strategi dan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di wilayah Kemantren Kraton dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, terencana, terpadu sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, data dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini, sehingga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Kraton secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Mantri Pamong Praja

Drs. SUMARGANDI, M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196903121989031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 1
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.4 Sistematika Penulisan ..... I - 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... II - 1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..... II - 1
2.1.2 Sumber Daya Kemantren Kraton ..... II - 11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton ..... II - 16
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kemantren Kraton ..... II - 21
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan ..... II - 22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis ..... II - 23
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Kraton ..... II - 23
2.2.2 Isu Strategis ..... II - 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAHAN KEBIJAKAN ..... III - 1
3.1 Tujuan Renstra Kemantren Kraton Tahun 2025-2029 ..... III - 1
3.2 Sasaran Renstra Kemantren Kraton Tahun 2025-2029 ..... III - 2
3.3 Strategi Kemantren Kraton dalam Mencapai Tujuan ..... III - 4
3.3.1 Penahapan Pembangunan ..... III - 4
3.3.2 Lokus Renstra Perangkat Daerah ..... III - 8
3.4 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 ..... III - 8
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... IV - 1
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan ..... IV - 1
4.2 Program Prioritas ..... IV - 36
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton ..... IV - 39
BAB V PENUTUP ..... V -1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Teknis Mengumpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	II - 26
Tabel	3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Pemerintah Kota Yogyakarta	III - 3
Tabel	3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	III - 6
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III - 9
Tabel	4.1	Teknik Merumuskan Program Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV - 5
Tabel	4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	IV - 17
Tabel	4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 38
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV - 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun sehingga pelaksanaan kinerja tahunan menjadi lebih terarah dan terjaga kontinuitasnya.

Dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Regulasi yang berlaku;
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD); serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang *responsive gender* dan inklusif menggunakan nomenklatur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kematren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2042 (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43):
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Kraton Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Yogyakarta dari aspek Keberdayaan Masyarakat dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan , serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan diselesaikan oleh Kemantren Kraton.

Tujuan disusunnya Renstra Kemantren Kraton adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan Kemantren Kraton, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan program-kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Renstra Kemantren Kraton akan menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan Kemantren Kraton dalam jangka 5 tahun (2025-2029), menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan renja yang bersifat tahunan serta sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kemantren Kraton Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan
2. Sasaran
3. Strategi
4. Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
2. Program Prioritas
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan di masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
m. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan

Kemantren;

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

A. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kemantren terdiri atas:

a. Mantri Pamong Praja;
b. Mantri Anom, terdiri atas:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Umum.

Mantri Pamong Praja mempunya tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren, dan mempunya fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. penerbitan dokumen perizinan dan / atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

B. Mantri Anom memiliki tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
2. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
3. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
7. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
9. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada sekretariat Kemantren;
11. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat Kemantren;
12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
13. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Mantri Anom membawahi dua Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut:
    1. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
    3. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
    4. pengelolaan aset Kemantren;
    5. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
    6. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
    7. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
    8. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
    9. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
    10. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
    11. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
    12. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
    13. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    14. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    15. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah:
    1. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
    3. penatausahaan keuangan Kemantren;
    4. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
    5. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
    6. pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban keuangan Kemantren;

7. penyusunan pertanggung jawaban keuangan Kemantren;
8. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
9. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
10. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
11. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
12. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
13. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. pengelolaan arsip Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
15. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
16. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren;
4. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren;
5. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang tugasnya;
6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
7. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
8. penyiapan bahan penetapan kepengurusan rukun tetangga, rukun warga, pengurus kampung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
9. pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan rukun tetangga, rukun warga,

pengurus kampung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

10. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
11. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
12. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
13. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tataruang di tingkat Kemantren;
14. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* dalam rangka kegiatan pemerintahan;
15. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
16. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
17. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
18. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d aerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
2. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
4. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
5. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
6. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang keamanan dan ketertiban;
7. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pembinaan PKL di tingkat Kemantren;
8. pengawasan dan penindakan PKL di wilayah Kemantren secara represif non yustisi;
9. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
10. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;

11. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
12. pelaksanaan pengawasan dan tindakan non yustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
13. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
14. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
15. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
16. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
18. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
19. perencanaan, penentuan titik lokasi, pengadaan dan pemasangan cermin tikungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
20. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
21. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
22. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
23. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
24. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang

tugasnya;

4. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
5. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
7. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
8. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
9. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
10. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
11. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
12. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umumdi wilayah Kemantren;
13. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
14. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
15. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
16. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
17. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
18. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
2. pengoordinasian usulan perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan oleh Kelurahan;

4. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. pengoordinasian pembinaan teknis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
6. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
7. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
8. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
9. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang tugasnya;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
11. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
12. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
13. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
14. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
15. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
16. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
17. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
18. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
19. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
20. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
2. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
4. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
5. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang

pelayanan umum;

6. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pelayanan umum;
7. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
8. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
9. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
10. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
11. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
12. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
13. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
14. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
15. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
16. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Kraton sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi Kemantren

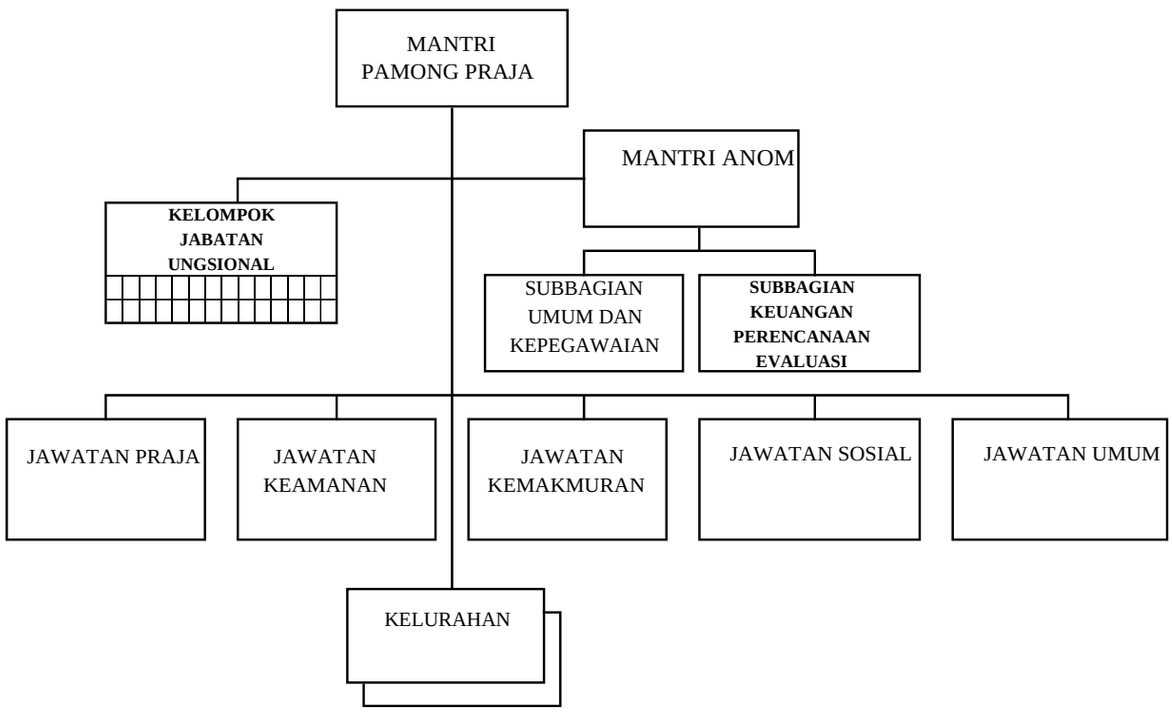

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
2. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Mantri Anom adalah sebutan dari Sekretaris Kemantren.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Jawatan Praja adalah sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.
8. Jawatan Keamanan adalah sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
9. Jawatan Kemakmuran adalah sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
10. Jawatan Sosial adalah sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.
11. Jawatan Umum adalah sebutan dari Seksi Pelayanan Umum.
12. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya Kemantren Kraton

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya, sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kemantren maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kemantren, menambah beban tugas. Di Kemantren Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 40 orang termasuk Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP), yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal

sesuai anjab masih sangat kurang. Sedangkan dari segi kualitas sumber daya manusia di Kantor Kemantren maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Namun demikian keterbatasan jumlah SDM diharapkan tidak menghambat capaian kinerja yang targetkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemantren Kraton yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan pada Tahun 2025 didukung oleh sebanyak 40 orang pegawai, terdiri dari 30 orang pegawai tetap (PNS), 10 orang pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP). Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kemantren Kraton (PNS) terdiri dari:

Pegawai PNS Perempuan:
Jumlah : 16 orang
SMA : 2 orang
D2/3 : 4 orang
S1 : 8 orang
S2 : 2 orang

Pegawai PNS Laki-laki:
Jumlah : 14 orang
SMP : 1 orang
SMA : - orang
D2/3 : 1 orang
S1 : 9 orang
S2 : 3 orang

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya penataan ruang pelayanan di Kemantren, namun masih dirasakan kurang memadai dikarenakan keterbatasan tempat dengan menyesuaikan jumlah pegawai jika jumlah pegawai nantinya tersedia sesuai formasi anjab. Sarana prasarana harus lebih ditingkatkan mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu OPD, berikut ini kami sampaikan barang-barang

inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Kraton.

Data Sarana dan Prasarana Kemantren Kraton

No	Spesifikasi Barang	Jumlah
1	A.C. Split	18
2	A.C. Window	1
3	ALAT KANTOR LAINNYA	4
4	ALAT KEDOKTERAN UMUM	3
5	Alat Pemadam/Portable	5
6	Alat Pemotong Kertas	1
7	ALAT PENDINGIN	4
8	Alat Peraga Edukatif (APE) Arena Permainan Anak	1
9	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	54
10	Alat Tenis Meja	12
11	Amplifier	2
12	Bangku Tunggu	7
13	Brandkas	3
14	Camera Digital	7
15	CCTV	16
16	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3
17	Container	2
18	Dispenser	7
19	Exhause Fan	2
20	Facsimile	1
21	Filing Cabinet Besi	22
22	Filing Cabinet Kayu	1
23	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4
24	Freezer	1
25	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
26	Gerobak Dorong	3
27	Gordyin/Kray	20
28	Handrailing Difable (Alat Rumah Tangga Lainnya (HO	1
29	Handy Talky (HT)	4
30	Horizontal Blind	8
31	Jam Elektronik	11

32	Jam Mekanis	2
33	Kardex Besi	2
34	Karpet	1
35	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	1
36	Kipas Angin	35
37	Kompor Gas (Alat Dapur)	3
38	KOMPUTER JARINGAN	1
39	Kursi Besi/Metal	3
40	Kursi Biasa	15
41	Kursi Kayu	2
42	Kursi Lipat	402
43	Kursi Putar	24
44	Kursi Rapat	108
45	Kursi Tamu	1
46	Lambang Garuda Pancasila	5
47	Lap Top	8
48	LCD Projector/Infocus	8
49	Lemari Besi/Metal	4
50	Lemari Kaca	3
51	Lemari Kayu	19
52	Lemari Sorok	8
53	Loudspeaker	6
54	Megaphone	5
55	Meja 1/2 Biro	20
56	Meja Kerja Besi/Metal	3
57	Meja Kerja Kayu	21
58	Meja Ketik	9
59	Meja Komputer	7
60	Meja Makan Kayu	1
61	Meja Panjang	5
62	Meja Rapat	56
63	Meja Resepsionis	2
64	Meja Tamu (Meubelair)	1
65	Meja Telepon	1
66	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	5

67	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1
68	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1
69	MEUBELAIR	7
70	Microphone	5
71	Monitor	1
72	Note Book	2
73	P.C Unit	47
74	Papan Absen	1
75	Papan Nama Instansi	6
76	Papan Pengumuman	37
77	Papan Tulis	1
78	Papan Visual/Papan Nama	5
79	Pataka	8
80	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	5
81	PERALATAN PERMAINAN	1
82	PERALATAN STUDIO AUDIO	8
83	Pesawat Telephone	5
84	Pick Up	1
85	Pompa Air	1
86	Pompa Kebakaran/Portable	1
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39
88	Professional Sound System	2
89	Radio	1
90	Rak Besi	13
91	Rak Kayu	3
92	Rambu Cermin	16
93	Rambu Jalan	28
94	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	5
95	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
96	Sepeda	6
97	Sepeda Motor	14
98	Server	1
99	Sice	5
100	Sofa	3
101	Sound System	6

102	Stabilisator	2
103	Station Wagon	1
104	Stationary Generating Set	1
105	Tangga Aluminium	4
106	Telephone (PABX)	1
107	Televisi	10
108	Tempat Tidur Besi	2
109	Tensimeter	10
110	Tiang Bendera	2
111	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	10
112	Timbangan Bayi	18
113	Timbangan Orang	1
114	Ukur Tinggi Badan	10
115	Uninterupted Power Supply (UPS)	8
116	Vertikal Blind	1
117	Video Conference	2
118	Wheel Bin/Tempat Sampah (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8
119	White Board	13
120	Wireless	4
121	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	1
122	Ekonomi	2
123	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	4
124	Etnografi, Cerita Rakyat	2
125	Hukum	8
126	Ilmu Pengetahuan Umum	67
127	Pendidikan	1
128	Peta (Map)	3
129	Service Umum Sosial	3
130	Sosiologi	1
131	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	152

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton

Kemantren Kraton sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat

Kemantren. Dalam Renstra Periode 2023-2026 dalam rangka mendukung urusan tersebut ditetapkan dua tujuan Kemantren Kraton yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 385 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.
2. Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah BB sedangkan target pada akhir Renstra sesuai dengan Review Renstra adalah A.

Sasaran Strategis Kemantren Kraton adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatknya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton. Sasaran Strategis tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah 385 sedangkan target sasaran pada akhir Renstra adalah 400.
2 Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah BB sedangkan target pada akhir Renstra sesuai denga Review Renstra adalah A.

Tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh program kegiatan yang diampu oleh Kemantren Kraton yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan target dan realisasi lima tahun terakhir (2020-2024) sebagaima tertuang dalam tabel di bawah ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2024

Tahun 2020-2022:

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Niliai Keistimewaan

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

Tahun 2023-2024:

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Poin	341,67	350.67	346.67	364,67	364,67	380	385	385,55	391,55	391,55
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Poin	77,19	81,75	77,69	85,25	85,25	85,44	85,5	85,65	85,75	86,66
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Rupiah	429.601.667	985.272.500	429.601.667	964.503.000	429.601.667	1.261.258.000	-	-	-	-
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Rupiah	-	-	-	-	-	-	1.024.570.000	1.199.241.000	1.032.431.000	1.433.886.600
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	-	-	100	38	38	36	36	32	36	32

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Program Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	-	BB	AA	A	A
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Nilai	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kraton pada awal Tahun 2020 dalam Renstra 2017-2022 memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai Survey Kepuasanan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat, kemudian pada Tahun 2020 tersebut ada review indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada Tahun 2021 dilakukan review renstra yaitu review indikator program berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton menjadi 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan indikator program bertambah 1 (satu) yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga ada 3 (tiga) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Kraton meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Kraton menurun dengan indikator jumlah pelanggaran perda menurun dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Kraton meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Berdasarakan tabel penyandingan di atas capaian periode Renstra 2017-2022 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program sampai dengan tahun 2022 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Kraton dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten.

Sementara untuk capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024 sesuai dengan periode Renstra yang berbeda yaitu Periode Renstra 2023-2026. Dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton ada perubahan, di periode Renstra Tahun 2017-2022 hanya ada satu IKU yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dari Sasaran Strategis Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton meningkat dengan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat, sementara di periode Renstra Tahun 2023-2026 ada dua IKU dari dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang

Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, dan Misi 6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum. Sehingga untuk secara sederhananya perbandingan dengan tahun sebelumnya tersaji seperti tabel di atas.

Dari capaian 5 lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran dan indikator program setiap tahunnya sudah melebihi dari yang di targetkan, keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Didukung oleh program kegiatan di Kemantren Kraton dan partisipasi warga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kemantren Kraton tersebut;
2. Kepemimpinan Mantri Pamong Praja dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan kepada mitra kerja pemerintah dan warga mayarakat untuk mendukung dan mensukseskan program dan kegiatan di Kemantren Kraton dan juga dengan dukungan lewat swadaya masyarakat total;
3. Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Mantri Pamong Praja, Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang;
4. Semangat warga masyarakat untuk membangun wilayahnya;
5. Koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Forkompimka dan juga OPD terkait terlaksana dengan baik untuk menyelesaikan permasalah yang timbul di Kemantren Kraton;
6. Inovasi Kemantren Kraton “Lapis Keraton” (Layanan Pasar Kamis Kemantren Kraton) sangat membantu warga dalam mendapatkan berbagai pelayanan yaitu mengintegrasikan 8 jenis layanan antara lain: Konsultasi Psikologi, Konsultasi dan Cek Kesehatan, Konsultasi dan Pendampingan Manajemen Bisnis UMKM, Konsultasi dan Pembayaran PBB-P2, Pendampingan Perizinan *Online* Bangunan Gedung (KKPR dan IMB), Pendampingan Perizinan Berusaha melalui OSS, Layanan Bank Jogja dan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kemantren Kraton

Kelompok sasaran dari Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kemantren Kraton tersebut, mencakup individu, keluarga, dan kelompok sosial lainnya. Kemantren sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan kota, memiliki tanggung jawab untuk melayani dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya, mulai dari pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, hingga kesejahteraan sosial.

Secara rinci kelompok sasaran ini meliputi:

1. Seluruh penduduk di Kemantren Kraton

   Setiap individu yang tinggal di wilayah Kemantren Kraton, baik warga asli maupun pendatang, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia.

2. Keluarga

   Kemantren juga berperan dalam menangani berbagai permasalahan keluarga, seperti kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

3. Kelompok Masyarakat

   Kemantren Kraton berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti RT/RW, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok rentan.

4. Pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan

   Ini termasuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, bantuan sosial, serta informasi dan edukasi terkait berbagai program pemerintah.

Dengan demikian, Kemantren hadir untuk melayani dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya serta memastikan terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban umum.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Mitra perangkat daerah dari Kemantren Kota Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan mengacu pada instansi atau organisasi yang bekerja sama dengan Kemantren Kraton dalam melaksanakan berbagai program dan pelayanan publik. Kemantren Kraton sebagai bagian dari Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Kemantren Kraton memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah Kemantren Kraton.

Mitra perangkat daerah dari Kemantren Kraton bisa mencakup berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan potensi dalam mendukung program-program Kemantren Kraton.

Mitra Perangkat Daerah dari Kemantren Kraton antara lain:

- Bappeda : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan.
- BPKAD : Penyusunan Dokumen Penganggaran, penatusahaan, akuntasi dan pelaporan serta aset.
- BKPSDM : Pengelolaan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
- Sekretariat Daerah : Perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama daerah, pengendalian pembangunan, pengadaan barang dan jasa kesekretariatan.

- Inspektorat : Pengawasan dan *Consulting.*
- Dinas Kominfo : Pengembangan *e-government*, penyelenggaraan data sektoral dan pemeliharaan CCTV di wilayah.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Pengelolaan kearsipan.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : Pelayanan administrasi kependudukan.
- Bagian Tata Pemerintahan : Penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren Kraton.
- Satpol PP : Operasi ketertiban dalam menanggulangi pelanggaran perda.
- Dinas Kesehatan : Pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Kemantren Kraton.
- Dinas Pendidikan : Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tingkat Kemantren Kraton.
- Dinas Sosial : Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- Kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di tingkat Kemantren Kraton.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis, Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Kraton

Perangkat Daerah Kemantren Kraton dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Kraton ada beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Pemberdayaan Masyarakat belum merata

   Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan. Namun dalam praktiknya,

pemberdayaan sering kali tidak merata, menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses dan manfaat yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

2. Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah
   Pelatihan dan pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi SDM.
3. Penanganan sampah belum optimal
   Belum optimalnya warga masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, menjaga kondisi tidak adanya pembuangan sampah liar.

2.2.2 Isu Strategis

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender

   Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

   Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin dan difabel (Pengarusutamaan Gender).

   Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

2. Pembangunan kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan

pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah.

3. Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi

   Kemantren Kraton dan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah dua hal yang saling terkait. Sumbu Filosofi adalah garis imajiner yang menghubungkan Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak, dan Kemantren Kraton merupakan salah satu wilayah yang terletak di sepanjang sumbu tersebut. Sumbu Filosofi memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat Jawa, yang melambangkan perjalanan manusia dari lahir hingga kembali ke Sang Pencipta.

   Kemantren Kraton ikut mengkondisikan cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi. Kondisi saat ini semakin luntur adat istiadat Jawa (unggah-ungguh) di tengah masyarakat terbukti anak-anak kecil dan remaja dalam kehidupan sehari-hari kurang memahami dari bahasa, adat istiadat, dan sopan santun Jawa.

4. Pengkondisian keamanan ketertiban dalam mendukung ketertiban pada acara Keraton Yogyakarta**.**

   Di dalam Kemantren Kraton terdapat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Keraton Yogyakarta), dan memiliki tiga kelurahan, yaitu Patehan, Panembahan, dan Kadipaten. Selain Keraton, wilayah di Kemantren Kraton juga memiliki berbagai daya tarik wisata termasuk acara-acara yang merupakan event rutin di Keraton Yogyakarta seperti Grebeg. Grebeg adalah upacara tradisional di Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan tiga kali dalam setahun, yaitu saat Maulid Nabi Muhammad (Grebeg Mulud), Idul Fitri (Grebeg Syawal), dan Idul Adha (Grebeg Besar). Upacara ini melibatkan prosesi gunungan, yaitu sesajian yang terbuat dari hasil bumi, yang diarak dari keraton menuju masjid.

   Dalam acara Grebeg tersebut perlu didukung pengamanan baik dari aparat TNI, Polri, Sipil baik ditingkat DIY, Kota sampai tingkat Kemantren. Demikian juga dengan event-event Keraton yang lain, Kemantren juga mendukung dalam segi pengamanan.

5. Penanganan sampah dengan tertib dalam membuang sampah, memilah sampah dan mengelola sampah.

   Dengan adanya pengaturan mekanisme pembuangan sampah ke Depo memungkinkan adanya warga Masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga perlu adanya pengawasan dan pembinaan kepada warga Masyarakat agar tertib dalam membuang sampah, serta aktif memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dikelola di masing-masing rumah tangga, sampah anorganik dikelola di bank sampah.

Teknis menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Kraton seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Teknis Merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan-pelatihan - Sosial, melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi	Ketidakpastian kondisi ekonomi global	Kerentanan ketahanan sosial ekonomi terhadap krisi pangan dan risiko bencana	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan Regional DIY	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan pelatihan peningkatan perekonomian kepada UMKM dan warga masyarakat - Sosial melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	- Ketidakpastian kondisi ekonomi global - Disrupsi informasi, polarisasi sosial dan ketimpangan yang meningkat	- Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan budaya di perkotaan - Kerentanan ketahanan sosial ekonomi terhadap krisis pangan dan risiko bencana	- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan - Peningkatan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal	Pembangunan kewilayahan sebagai pemantik perekonomian
- Lingkungan hidup - Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - Pemberdayaan masyarakat Kemantren Kraton berperan penting dalam menjaga dan melestarikan kawasan sumbu filosofi ini, termasuk kebersihan dan keberlanjutannya, serta mendukung upaya menjadikan sumbu filosofi sebagai warisan dunia	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah	Penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban	Perubahan iklim dan ketahanan kota	- Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan budaya di perkotaan - Penguatan daya saing pariwisata budaya dalam konteks pariwisata nasional	Penetapan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia dan implementasi	Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Koordinasi dan operasi ketertiban rutin dilaksanakan dalam pengkondisian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pengkondisian lingkungan tertib dan aman	Penegakan hukum terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban	Disrupsi informasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan yang meningkat	Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	Pengkondisian keamanan ketertiban dalam mendukung ketertiban pada acara Keraton Yogyakarta
- Lingkungan hidup - Sosial - Pemberdayaan masyarakat Pemilahan sampah tingkat rumah tangga sudah dilakukan dan bank sampah sudah terbentuk di masing-masing RW. Pembuangan sampah sudah melalui penggerobag	Penanganan sampah belum optimal	Pengelolaan persampahan yang belum optimal	- Perubahan iklim dan ketahanan kota - Komitmen mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA)	- Tantangan transisi ke kota rendah emisi dan berketahanan lingkungan - Peran Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	Penanganan sampah dengan tertib dalam membuang sampah, memilah sampah dan mengelola sampah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kemantren Kraton Tahun 2025-2029

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Kraton yang merupakan dokumen perencanaan OPD Kemantren Kraton 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi OPD sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Kraton memiliki satu tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kraton** tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan **Indeks Pembangunan Kemantren Kraton** dengan formula perhitungan: 80 % nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren + 20 % nilai Evaluasi Kinerja Kemantren.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) adalah proses sistematis untuk menilai kinerja seorang Mantri Pamong Praja dan seluruh perangkat Kemantren dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren di Pemerintah Kota Yogyakarta. EKK bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

EKK dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren, serta untuk meningkatkan kinerja Mantri Pamong Praja dan perangkatnya. EKK melibatkan tim evaluasi yang melakukan penilaian secara sistematis terhadap kinerja Kemantren berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.

EKK mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Kemantren. Hasil EKK dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, memberikan penghargaan kepada Kemantren yang berprestasi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Tujuan Kemantren Kraton Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator Indeks pembangunan Kemantren Kraton, pada awal Renstra target indikator tujuan adalah 516,87 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 519,80.

3.2 Sasaran Renstra Kemantren Kraton Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kemantren Kraton untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kemantren Kraton menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton
   Dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dan dengan formula perhitungan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton target pada awal Renstra adalah 406,33 dan target pada akhir Renstra adalah 409.
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang Baik dan Adaptif.
   Dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dan dengan formula perhitungan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Sasaran Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang Baik dan Adaptif target pada awal Renstra A (89,212 – 90,0) dan target pada akhir Renstra adalah A (89,217 – 90,0)

Teknik dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran seperti dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton		Indeks pembangunan Kemantren Kraton (Poin)	516.87	516.87	517.60	518.33	519.07	519.80	520.53	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton (poin)	406.33	406.33	407.00	407.67	408.33	409.00	409.67	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3 Strategi Kemantren Kraton dalam Mencapai Tujuan

Upaya mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu Membangunan "Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Kraton menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Kraton mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Kraton.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Kraton mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.3.1 Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. RPJMD 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar

pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban", yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii)

Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup

layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

   Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

   Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

3.3.2 Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode 2025–2029, Kemantren Kraton difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Kraton pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam Renstra Kemantren Kraton 2025-2029 selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari misi dan aspek strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kraton	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan sinergitas *stakeholder* penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kemantren Kraton Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Patehen
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Patehan
2) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Panembahan
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Panembahan
3) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kel. Kadipaten
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kel. Kadipaten

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Dengan Sub Kegiatan
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   2. Evaluasi Kelurahan
3) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan
   2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan
4) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan
   2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan
5) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten
   2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten
6) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   Dengan Sub Kegiatan:
   1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan Sub kegiatan :
   1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
4. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dengan Sub kegiatan :

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menggambarkan/merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton				Indeks pembangunan Kemantren Kraton		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Kraton)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Patehan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Panembahan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kadipaten)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Kraton)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kadipaten)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Panembahan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Panembahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Patehan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Patehan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Kraton)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Panembahan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Panembahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kadipaten)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Patehan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Patehan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kraton		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kraton		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Operasi Ketertiban		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Kraton		Nilai Sakip Kemantren Kraton	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Kraton	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Kraton	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Kraton sesuai dengan tabel berikut ini :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Kraton	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	30.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Kadipaten)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Panembahan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Panembahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Patehan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Patehan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Kraton)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				11.239.450.983		10.068.550.958		10.273.338.612		10.534.095.061		10.820.471.228		11.193.078.477		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.346.696.332		6.411.139.434		6.541.537.761		6.707.574.160		6.889.923.890		7.127.181.173		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Kraton	Nilai SPIP Kemantren Kraton (Nilai)	4,399	4,399	7.346.696.332	4,4	6.411.139.434	4,401	6.541.537.761	4,402	6.707.574.160	4,403	6.889.923.890	4,404	7.127.181.173	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Nilai Sakip Kemantren Kraton (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
	Nilai IKM Kemantren Kraton (Nilai)	86,66	86,66		87		87,25		87,5		87,75		88			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.509.800		7.907.000		8.067.829		8.272.591		8.497.522		8.790.177		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.509.800	1	7.907.000	1	8.067.829	1	8.272.591	1	8.497.522	1	8.790.177		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	5		3		3		3		5		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.699.900		1.682.000		1.716.212		1.759.769		1.807.617		1.869.872		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	5	4.699.900	3	1.682.000	3	1.716.212	3	1.759.769	5	1.807.617	3	1.869.872		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.065.000		705.000		719.340		737.597		757.652		783.745		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.065.000	1	705.000	1	719.340	1	737.597	1	757.652	1	783.745		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.065.000		705.000		719.340		737.597		757.652		783.745		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.065.000	1	705.000	1	719.340	1	737.597	1	757.652	1	783.745		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				720.000		1.065.000		1.086.662		1.114.242		1.144.538		1.183.956		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	720.000	1	1.065.000	1	1.086.662	1	1.114.242	1	1.144.538	1	1.183.956		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				720.000		1.665.000		1.698.866		1.741.983		1.789.348		1.850.973		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	720.000	1	1.665.000	1	1.698.866	1	1.741.983	1	1.789.348	1	1.850.973		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.549.900		1.755.000		1.790.697		1.836.145		1.886.069		1.951.026		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	5	3.549.900	5	1.755.000	5	1.790.697	5	1.836.145	5	1.886.069	5	1.951.026		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				690.000		330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	690.000	1	330.000	1	336.712	1	345.258	1	354.646	1	366.860		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.496.241.500		4.900.272.000		4.999.943.531		5.126.842.099		5.266.240.936		5.447.610.273		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.496.241.500	1	4.900.272.000	1	4.999.943.531	1	5.126.842.099	1	5.266.240.936	1	5.447.610.273		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33		33		33		33		33		33			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.489.040.000		4.896.165.000		4.995.752.996		5.122.545.207		5.261.827.211		5.443.044.540		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33	5.489.040.000	33	4.896.165.000	33	4.995.752.996	33	5.122.545.207	33	5.261.827.211	33	5.443.044.540		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				160.500		150.000		153.051		156.935		161.203		166.754		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	160.500	12	150.000	12	153.051	12	156.935	12	161.203	12	166.754		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.680.000		960.000		979.526		1.004.387		1.031.696		1.067.228		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1.680.000	12	960.000	12	979.526	12	1.004.387	12	1.031.696	12	1.067.228		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				700.500		495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	70.500	1	495.000	1	505.068	1	517.887	1	531.968	1	550.289		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				385.500		207.000		211.210		216.571		222.459		230.121		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	385.500	1	207.000	1	211.210	1	216.571	1	222.459	1	230.121		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.930.000		2.130.000		2.173.324		2.228.483		2.289.076		2.367.911		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	3.930.000	12	2.130.000	12	2.173.324	12	2.228.483	12	2.289.076	12	2.367.911		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				345.000		165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	345.000	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.312.000		3.960.000		4.040.548		4.143.096		4.255.745		4.402.314		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3.312.000	1	3.960.000	1	4.040.548	1	4.143.096	1	4.255.745	1	4.402.314		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				552.000		440.000		448.950		460.344		472.861		489.146		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	552.000	3	440.000	3	448.950	3	460.344	3	472.861	3	489.146		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				276.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	276.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				276.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	276.000	2	220.000	2	224.475	2	230.172	2	236.430	2	244.573		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.656.000		2.640.000		2.693.698		2.762.064		2.837.164		2.934.876		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	1.656.000	2	2.640.000	2	2.693.698	2	2.762.064	2	2.837.164	2	2.934.876		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				276.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	276.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				276.000		220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	276.000	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.380.000		2.640.000		2.693.697		2.762.064		2.837.164		2.934.876		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	1.380.000	2	2.640.000	2	2.693.697	2	2.762.064	2	2.837.164	2	2.934.876		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		1.980.000		2.020.273		2.071.548		2.127.873		2.201.157		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	-	1	1.980.000	1	2.020.273	1	2.071.548	1	2.127.873	1	2.201.157		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.380.000		660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	1.380.000	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				189.292.636		171.351.584		174.836.875		179.274.235		184.148.702		190.490.783		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	189.292.636	1	171.351.584	1	174.836.875	1	179.274.235	1	184.148.702	1	190.490.783		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.537.800		15.533.300		15.849.247		16.251.501		16.693.380		17.268.300		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	15.537.800	12	15.533.300	12	15.849.247	12	16.251.501	12	16.693.380	12	17.268.300		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.225.736		53.434.384		54.521.239		55.904.988		57.425.045		59.402.764		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	68.225.736	12	53.434.384	12	54.521.239	12	55.904.988	12	57.425.045	12	59.402.764		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.546.000		7.878.500		8.038.749		8.242.772		8.466.893		8.758.493		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	5.546.000	12	7.878.500	12	8.038.749	12	8.242.772	12	8.466.893	12	8.758.493		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.642.100		23.918.400		24.404.900		25.024.297		25.704.707		26.589.977		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	28.642.100	12	23.918.400	12	24.404.900	12	25.024.297	12	25.704.707	12	26.589.977		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.341.000		63.937.000		65.237.479		66.893.206		68.712.032		71.078.474		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	71.341.000	12	63.937.000	12	65.237.479	12	66.893.206	12	68.712.032	12	71.078.474		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		6.650.000		6.785.261		6.957.471		7.146.645		7.392.775		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	-	1	6.650.000	1	6.785.261	1	6.957.471	1	7.146.645	1	7.392.775		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				348.313.720		92.420.550		94.296.133		96.701.539		99.301.646		102.689.899		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	35	348.313.720	16	92.420.550	17	94.296.133	18	96.701.539	19	99.301.646	20	102.689.899		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	188	91		30		31		32		33		34			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				183.185.920		34.770.000		35.472.971		36.385.445		37.345.557		38.600.043		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	188	91	183.185.920	30	34.770.000	31	35.472.971	32	36.385.445	33	37.345.557	34	38.600.043		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				165.127.800		57.650.550		58.823.162		60.316.094		61.956.089		64.089.856		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	35	165.127.800	16	57.650.550	17	58.823.162	18	60.316.094	19	61.956.089	20	64.089.856		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				831.752.000		891.742.000		909.880.033		932.972.788		958.340.317		991.345.558		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	831.752.000	12	891.742.000	12	909.880.033	12	932.972.788	12	958.340.317	12	991.345.558		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		1.300.000		1.326.442		1.360.107		1.397.088		1.445.204		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	1.600.000	2	1.300.000	2	1.326.442	2	1.360.107	2	1.397.088	2	1.445.204		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.480.000		188.040.000		191.864.734		196.734.261		202.083.465		209.043.220		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	144.480.000	12	188.040.000	12	191.864.734	12	196.734.261	12	202.083.465	12	209.043.220		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				685.672.000		702.402.000		716.688.857		734.878.420		754.859.764		780.857.134		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	685.672.000	12	702.402.000	12	716.688.857	12	734.878.420	12	754.859.764	12	780.857.134		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				463.894.676		340.846.300		347.779.115		356.605.748		366.301.858		378.917.293		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	463.894.676	1	340.846.300	1	347.779.115	1	356.605.748	1	366.301.858	1	378.917.293		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	7		9		9		9		9		9			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	128	27		30		31		32		33		34			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	44		36		37		38		39		40			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		16		16		16		16		16			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				107.457.000		25.740.000		26.263.552		26.930.121		27.662.351		28.615.042		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	101.457.000	1	25.740.000	1	26.263.552	1	26.930.121	1	27.662.351	1	28.615.042		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		75.717.000		77.257.084		79.217.869		81.371.802		84.174.247		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	-	16	75.717.000	16	77.257.084	16	79.217.869	16	81.371.802	16	84.174.247		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.985.000		3.450.000		3.520.173		3.609.515		3.707.658		3.835.349		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	128	27	2.985.000	30	3.450.000	31	3.520.173	32	3.609.515	33	3.707.658	34	3.835.349		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.490.000		24.790.000		25.294.229		25.936.196		26.641.401		27.558.931		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	44	26.490.000	36	24.790.000	37	25.294.229	38	25.936.196	39	26.641.401	40	27.558.931		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				332.962.676		211.149.300		215.444.077		220.912.047		226.918.646		234.733.724		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	7	332.962.676	9	211.149.300	9	215.444.077	9	220.912.047	9	226.918.646	9	234.733.724		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				155.453.215		190.902.810		194.785.647		199.729.669		205.159.449		212.224.196		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kraton	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	116	116,33	155.453.215	116,33	190.902.810	116,67	194.785.647	117	199.729.669	117,33	205.159.449	117,67	212.224.196	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				40.262.000		77.306.000		78.878.404		80.880.338		83.079.474		85.940.731		
Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	15	15	40.262.000	15	77.306.000	15	78.878.404	15	80.880.338	15	83.079.474	15	85.940.731		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				40.262.000		77.306.000		78.878.404		80.880.338		83.079.474		85.940.731		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	15	15	40.262.000	15	77.306.000	15	78.878.404	15	80.880.338	15	83.079.474	15	85.940.731		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				115.191.215		113.596.810		115.907.243		118.849.331		122.079.975		126.283.465		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	115.191.215	12	113.596.810	12	115.907.243	12	118.849.331	12	122.079.975	12	126.283.465		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	11		11		11		11		11		11			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				11.940.115		11.583.000		11.818.598		12.118.554		12.448.058		12.876.769		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	11	11.940.115	11	11.583.000	11	11.818.598	11	12.118.554	11	12.448.058	11	12.876.769		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				103.251.100		102.013.810		104.088.645		106.730.777		109.631.917		113.406.696		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	103.251.100	12	102.013.810	12	104.088.645	12	106.730.777	12	109.631.917	12	113.406.696		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.605.124.936		3.368.171.714		3.436.678.095		3.523.907.380		3.619.707.073		3.744.353.132		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	196,33	196,33	1.090.744.200	196,67	965.641.000	197	985.279.906	197,33	1.010.292.705	197,67	1.037.747.215	198	1.073.470.577	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.318.037.686		3.047.939.634		3.109.932.495		3.188.868.976		3.275.558.975		3.388.352.574		
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	159	174	681.073.200	174	605.846.000	174	618.166.676	174	633.862.141	174	651.081.504	174	673.488.099		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				681.073.200		605.846.000		618.166.676		633.862.141		651.081.504		673.488.099		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	159	174	681.073.200	174	605.846.000	174	618.166.676	174	633.862.141	174	651.081.504	174	673.488.099		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	120	156	409.671.000	124	359.795.000	125	367.113.230	126	376.430.564	127	386.665.711	128	399.982.478		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				409.671.000		359.795.000		367.113.230		376.430.564		386.665.711		399.982.478		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	120	156	409.671.000	124	359.795.000	125	367.113.230	126	376.430.564	127	386.665.711	128	399.982.478		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	196,33	196,33	1.262.737.450	196,67	1.307.529.784	197	1.334.124.940	197,33	1.367.985.031	197,67	1.405.180.544	198	1.453.574.962		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.318.037.686		3.047.939.634		3.109.932.495		3.188.868.976		3.275.558.975		3.388.352.574		
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	220	234	692.938.250	234	690.101.900	234	704.138.573	234	722.009.610	234	741.641.051	234	767.183.169		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				692.938.250		690.101.900		704.138.573		722.009.610		741.641.051		767.183.169		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	220	234	692.938.250	234	690.101.900	234	704.138.573	234	722.009.610	234	741.641.051	234	767.183.169		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	149	184	569.799.200	166	617.427.884	167	629.986.367	168	645.975.421	169	663.539.493	170	686.391.793		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				569.799.200		617.427.884		629.986.367		645.975.421		663.539.493		686.391.793		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	149	184	569.799.200	166	617.427.884	167	629.986.367	168	645.975.421	169	663.539.493	170	686.391.793		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	196,33	196,33	875.659.036	196,67	724.943.850	197	739.689.208	197,33	758.462.520	197,67	779.085.116	198	805.916.807		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.318.037.686		3.047.939.634		3.109.932.495		3.188.868.976		3.275.558.975		3.388.352.574		
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	137	142	570.335.000	142	416.119.500	142	424.583.371	142	435.359.297	142	447.196.716	142	462.598.170		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				570.335.000		416.119.500		424.583.371		435.359.297		447.196.716		462.598.170		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	137	142	570.335.000	142	416.119.500	142	424.583.371	142	435.359.297	142	447.196.716	142	462.598.170		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	132	99	305.324.036	104	308.824.350	105	315.105.837	106	323.103.223	107	331.888.400	108	343.318.637		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				305.324.036		308.824.350		315.105.837		323.103.223		331.888.400		343.318.637		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	132	99	305.324.036	104	308.824.350	105	315.105.837	106	323.103.223	107	331.888.400	108	343.318.637		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	196,33	196,33	375.984.250	196,67	370.057.080	197	377.584.041	197,33	387.167.124	197,67	397.694.198	198	411.390.786		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				126.867.000		142.518.500		145.417.326		149.108.018		153.162.265		158.437.173		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	126.867.000	12	142.518.500	12	145.417.326	12	149.108.018	12	153.162.265	12	158.437.173		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				126.867.000		142.518.500		145.417.326		149.108.018		153.162.265		158.437.173		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	126.867.000	12	142.518.500	12	145.417.326	12	149.108.018	12	153.162.265	12	158.437.173		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.318.037.686		3.047.939.634		3.109.932.495		3.188.868.976		3.275.558.975		3.388.352.574		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	30	88.897.000	30	49.825.000	30	50.838.441	30	52.128.720	30	53.546.100	30	55.390.228		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				78.840.000		43.237.500		44.116.951		45.236.639		46.466.623		48.066.934		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	30	78.840.000	30	43.237.500	30	44.116.951	30	45.236.639	30	46.466.623	30	48.066.934		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.057.000		6.587.500		6.721.490		6.892.081		7.079.477		7.323.294		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	10.057.000	1	6.587.500	1	6.721.490	1	6.892.081	1	7.079.477	1	7.323.294		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				108.867.625		123.072.680		125.575.978		128.763.097		132.264.166		136.819.343		
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7	5	93.369.625	5	81.216.030	5	82.867.964	5	84.971.153	5	87.281.519	5	90.287.494		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				93.369.625		81.216.030		82.867.964		84.971.153		87.281.519		90.287.494		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7	5	93.369.625	5	81.216.030	5	82.867.964	5	84.971.153	5	87.281.519	5	90.287.494		
Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	15.498.000	4	41.856.650	4	42.708.014	4	43.791.944	4	44.982.647	4	46.531.849		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				15.498.000		41.856.650		42.708.014		43.791.944		44.982.647		46.531.849		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	15.498.000	4	41.856.650	4	42.708.014	4	43.791.944	4	44.982.647	4	46.531.849		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				51.352.625		54.640.900		55.752.296		57.167.289		58.721.667		60.744.042		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	35	10.764.625	35	13.246.300	35	13.515.730	35	13.858.759	35	14.235.579	35	14.725.852		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10.764.625		13.246.300		13.515.730		13.858.759		14.235.579		14.725.852		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	35	10.764.625	35	13.246.300	35	13.515.730	35	13.858.759	35	14.235.579	35	14.725.852		
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	40	35	4.925.000	35	3.380.000	35	3.448.749	35	3.536.279	35	3.632.429	35	3.757.530		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				4.925.000		3.380.000		3.448.749		3.536.279		3.632.429		3.757.530		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	40	35	4.925.000	35	3.380.000	35	3.448.749	35	3.536.279	35	3.632.429	35	3.757.530		
Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	15	35	35.663.000	35	38.014.600	35	38.787.817	35	39.772.251	35	40.853.659	35	42.260.660		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0		35		35		35		35		35			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	35		35		35		35		35		35			
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				19.964.000		20.795.000		21.217.970		21.756.482		22.348.041		23.117.708		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	35	19.964.000	35	20.795.000	35	21.217.970	35	21.756.482	35	22.348.041	35	23.117.708		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15.699.000		7.875.000		8.035.178		8.239.110		8.463.132		8.754.602		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	15	35	15.699.000	35	7.875.000	35	8.035.178	35	8.239.110	35	8.463.132	35	8.754.602		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		9.344.600		9.534.669		9.776.659		10.042.486		10.388.350		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0	0	35	9.344.600	35	9.534.669	35	9.776.659	35	10.042.486	35	10.388.350		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				95.377.500		62.177.000		63.441.639		65.051.906		66.820.384		69.121.370		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kraton	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100	95.377.500	100	62.177.000	100	63.441.639	100	65.051.906	100	66.820.384	100	69.121.370	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				95.377.500		62.177.000		63.441.639		65.051.906		66.820.384		69.121.370		
Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	95.377.500	12	62.177.000	12	63.441.639	12	65.051.906	12	66.820.384	12	69.121.370		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				95.377.500		62.177.000		63.441.639		65.051.906		66.820.384		69.121.370		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	95.377.500	12	62.177.000	12	63.441.639	12	65.051.906	12	66.820.384	12	69.121.370		
Meningkatnya Operasi Ketertiban				0		0		0		0		0		0		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				36.799.000		36.160.000		36.895.470		37.831.946		38.860.432		40.198.606		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	36.799.000	100	36.160.000	100	36.895.470	100	37.831.946	100	38.860.432	100	40.198.606	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				36.799.000		36.160.000		36.895.470		37.831.946		38.860.432		40.198.606		
Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	35	5.020.000	35	4.560.000	35	4.652.750	35	4.770.837	35	4.900.556	35	5.069.331		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5.020.000		4.560.000		4.652.750		4.770.837		4.900.556		5.069.331		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	35	5.020.000	35	4.560.000	35	4.652.750	35	4.770.837	35	4.900.556	35	5.069.331		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	31.779.000	12	31.600.000	12	32.242.720	12	33.061.109	12	33.959.876	12	35.129.275		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				31.779.000		31.600.000		32.242.720		33.061.109		33.959.876		35.129.275		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	31.779.000	12	31.600.000	12	32.242.720	12	33.061.109	12	33.959.876	12	35.129.275		

4.2 Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
   b. Kampung Layak Huni
   c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat

c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil .

Kemantren Kraton memang bukan OPD Penanggungjawab Program Prioritas Wali Kota Yogyakarta, namum Kemantren Kraton Adalah salah satu OPD yang menjadi pendukung dari Program Prioritas Wali Kota tersebut. Berikut Program Prioritas yang menjadi dukungan Kemantren Kraton yang tertuang dalam Renstra 2025- 2029 dan dalam RPJMD 2025-2029:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kemudian dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan juga dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang adaptif.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, kemudian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten.

   Kemudian dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, selanjutnya dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat dan Program Pemajuan Ekonomi Kreatif.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Jogja Tangguh Bencana.

Program Prioritas tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kraton	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Kadipaten	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Patehan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Panembahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kraton	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kraton	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.3 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKU berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 tetap berlaku, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kraton									
1.	Indeks pembangunan Kemantren Kraton	Poin	516,87	516,87	517,6	518,33	519,07	519,8	520,53	
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Poin	406,33	406,33	407	407,67	408,33	409	409,67	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Kraton ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kemantren Kraton pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kemantren Kraton. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Renstra 2025-2029, diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah yaitu Kemantren Kraton, maupun masyarakat termasuk terdiri dari para pelaku UMKM/wirausaha, lembaga masyarakat dan warga masyarakat. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Kraton ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Kraton.

Lampiran:

1. Pohon Kinerja Kemantren Kraton 2025-2029
2. Cascading Kinerja Kemantren Kraton 2025-2029
3. Data Kinerja (Metadata Renstra) Kemantren Kraton 2025-2029

POHON KINERJA
KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

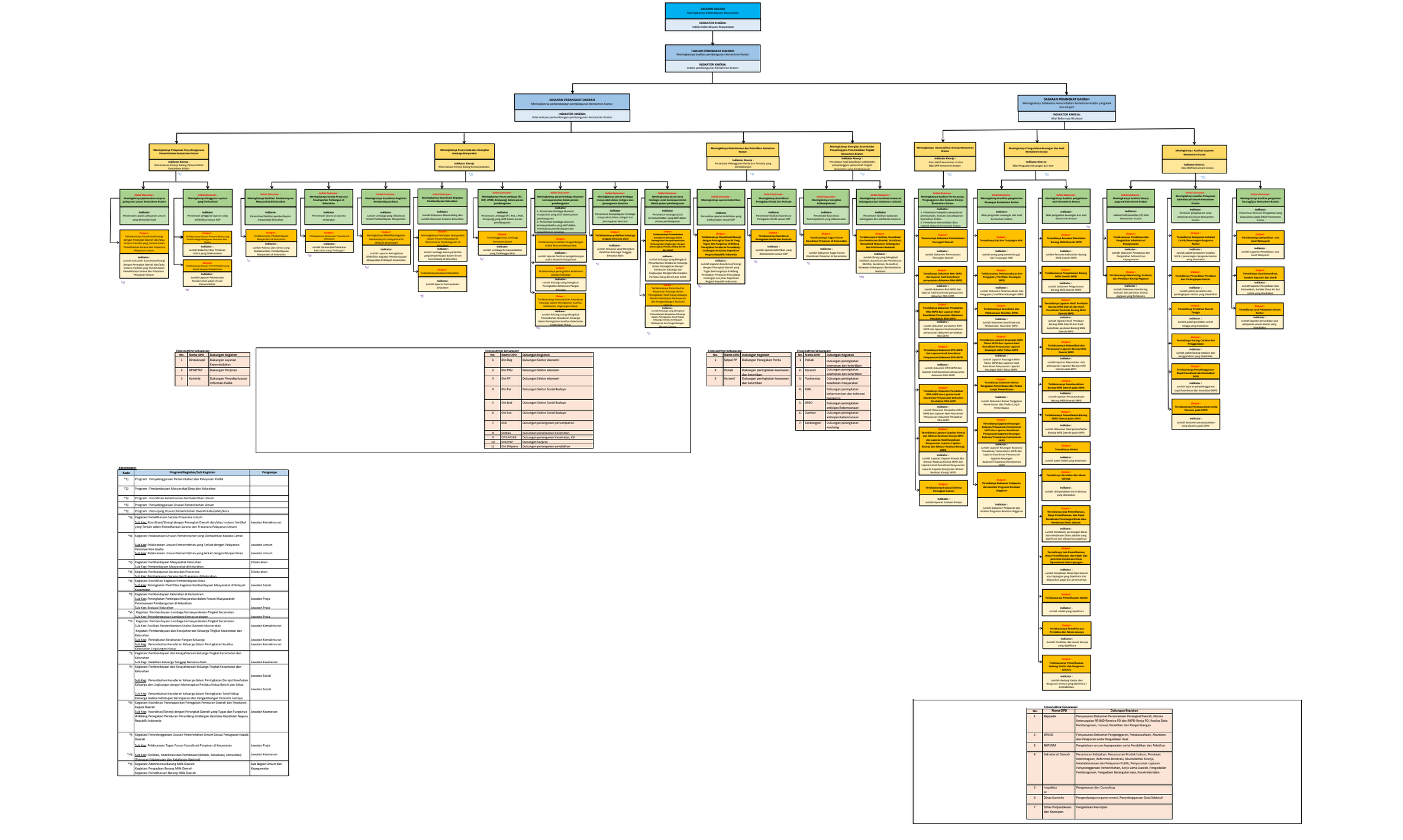

Cross-cutting keterkaitan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dindukcapil	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perijinan
3	Kominfo	Dukungan Pemberitaan Informasi Publik

Cross-cutting keterkaitan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Dag	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Bud	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sos	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	DLH	Dukungan penanganan persampahan
8	Dinkes	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DPUPKP	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
10	DPUPKP	Dukungan Sanpras
11	Dis Dikpora	Dukungan pemanganan pendidikan

Cross-cutting keterkaitan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Cross-cutting keterkaitan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2.	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3.	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4.	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi keagamaa
5.	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6.	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7.	Kesbangpol	Dukungan peningkatan wasbang

Keterangan:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengampu
*1)	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
*2)	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
*3)	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
*4)	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
*5)	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
*a)	Kegiatan: Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Sub Keg: koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan Kemakmuran
*b)	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Sub Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jawatan Umum Jawatan Umum
*c)	Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sub Keg: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kelurahan
*d)	Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Sub Keg: Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	3 Kelurahan
*e)	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Keg: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Social
*f)	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Sub Keg: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Keg: Evaluasi Kelurahan	Jawatan Praja Jawatan Praja
*e)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Keg: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jawatan Praja
*h)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Keg: Fasilitasi Penyembuhanan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarahan Sub Keg: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sub Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran
*i)	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarahan Sub Keg: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Kesemanan
*i)	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarahan Sub Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sub Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jawatan Social Jawatan Social
*k)	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jawatan Kesemanan
*l)	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah Sub Keg: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Praja
*m)	Sub Keg: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Kesemanan
*n)	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Cross-cutting keterkaitan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Kelencapaian RP.IMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengadaan Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipantaan.
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan

CASCADING KEMANTREN KRATON TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggung	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penganggung	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Penganggung	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Kemantren Kraton**	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton	Indeks pembangunan Kemantren Kraton	86% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	93,6	93,6	93,8	94,0	93,8	93,6	Meningkatnya Terlaksida Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (80,12-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,100-4,500)	A (80,13-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,400-4,500)	A (80,15-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,401-4,500)	A (80,16-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,401-4,500)	A (80,17-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,401-4,500)	A (80,18-90,00) Terlaksida dan Teralur (4,404-4,500)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kraton	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Nilai SAKIP Kemantren Kraton Nilai SPIP Kemantren Kraton Nilai IKM Kemantren Kraton	Mantri Anom	A (86,66-89,66) Terlaksida dan Teralur (4,100-4,500) 86,66	A (86,86-89,86) Terlaksida dan Teralur (4,400-4,500) 87,06	A (86,88-89,88) Terlaksida dan Teralur (4,401-4,500) 87,25	A (86,19-89,19) Terlaksida dan Teralur (4,403-4,500) 87,50	A (86,12-89,12) Terlaksida dan Teralur (4,403-4,500) 87,75	A (86,16-89,16) Terlaksida dan Teralur (4,404-4,500) 88,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kraton	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan penganggaran Kemantren Kraton Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kraton	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan penganggaran Kemantren Kraton yang sudah ditetapkan + jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang wajib ditetapkan x 100% Jumlah data statistik yang disediakan sesuai kesetaan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	Sub. Bag Keu PEP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Bag Keu PEP	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengganpu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengganpu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengganpu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
																															Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (KUBW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (BTJEW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Jasaatan Puja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jasaatan Puja	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga
																																Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	Jasaatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jasaatan Kemakmuran	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga
																													Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	Jasaatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terfasilitasinya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jasaatan Kemakmuran	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																																Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jasaatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Deviasi Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terfasilitasinya Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Deviasi Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Deviasi Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jasaatan Sosial	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																																Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jasaatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Deviasi Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terfasilitasinya Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Deviasi Kesehatan Keluarga Melalui Kebidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kebidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jasaatan Sosial	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																																Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jasaatan Kemakmuran	-	100%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemanfaatan Kesaktian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jasaatan Kemakmuran	-	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																																Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	Jasaatan Kesatuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terfasilitasinya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jasaatan Kesatuan	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga	35 keluarga
																				Program Koordinasi Kewenangan dan Kewenilhan Umum	Meningkatnya Kewenangan dan Kewenilhan Kenatuhra Kratuo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	Mantri Pamong Praja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi kenertiban	Persentase operasi kenertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	Dihitung dari jumlah operasi kenertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi kenertiban yang di rencanakan x 100 %	Jasaatan Kesatuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terfasilitasinya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jasaatan Kesatuan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
																																Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%																		

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KRATON
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030	Persetujuan	Catatan
									Target	Target	Target	Target	Target		Target		
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton	Indeks pembangunan Kemantren Kraton	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada **SIM Evdeskel** - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)				80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	516,87	516,87	517,60	518,33	519,07	519,80	519,80	520,53	TRUE	
						Sumber Data:											
						- Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Patehan	Poin	404	404	405	405	405	406	406	407	TRUE	
						- Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Panembahan	Poin	408	408	409	409	411	412	412	412	TRUE	
						- Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kadipaten	Poin	407	407	407	409	409	409	409	410	TRUE	
						- Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Kraton	poin	959,00	959,00	960,00	961,00	962,00	963,00	963,00	964,00	TRUE	
			1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	406,33	406,33	407,00	407,67	408,33	409,00	409,00	409,67	TRUE	
						Sumber Data:											
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Patehan	Poin	404	404	405	405	405	406	406	407	TRUE	
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Panembahan	Poin	408	408	409	409	411	412	412	412	TRUE	
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kadipaten	Poin	407	407	407	409	409	409	409	410	TRUE	
						Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	TRUE	
			1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton		Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A(89,212)	A (89,212 - 90,000)	A (89,214 - 90,000)	A (89,215 - 90,000)	A (89,216 - 90,000)	A (89,217 - 90,000)	A (89,217 - 90,000)	A (89,218 - 90,000)	TRUE	
						Sumber Data:											
						Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30) Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomer 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomer 9 karena tidak mengamanatkan RB level OPD sehingga disempurnakan dengan Kepwal.	Nilai	A(89,212)	A (89,212 - 90,000)	A (89,214 - 90,000)	A (89,215 - 90,000)	A (89,216 - 90,000)	A (89,217 - 90,000)	A (89,217 - 90,000)	A (89,218 - 90,000)	TRUE	

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KRATON
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	116,00	116,00	116,33	116,67	117,00	117,33	117,33	117,67	TRUE	
									Sumber Data :											
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patehan	Poin	115	115	116	116	116	117	117	117	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Panembahan	Poin	117	117	117	117	118	118	118	118	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kadipaten	Poin	116	116	116	117	117	117	117	118	TRUE	
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	TRUE	
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kraton	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik		Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber Data:											
									- Sarpras pelayanan umum berkondisi baik	unit	403								TRUE	
									- Total Sarpras	unit	403								TRUE	
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber Data:											
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	layanan	427								TRUE	
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi	layanan	427								TRUE	
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	196,33	196,33	196,67	197,00	197,33	197,67	197,67	198,00	TRUE	
									Sumber data:											
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patehan	Poin	198	198	198	198	198	198	198	199	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Panembahan	Poin	195	195	196	196	197	198	198	198	TRUE	
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kadipaten	Poin	196	196	196	197	197	197	197	197	TRUE	
									Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3	TRUE	
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	lembaga	20	20	20	20	20	20	20	20	TRUE	
									Sumber data:											
									Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	20	20	20	20	20	20	20	20	TRUE	
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		Jumlah Dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
									Sumber data:											
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
							- Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen Musrebang	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	TRUE	
									Sumber data:											
									Jumlah Dokumen Musrenbang yang DIsusun secara Tepat Waktu	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	TRUE	
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	125								TRUE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	125								TRUE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	

	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	142	142	142	142	142	142	142	142	TRUE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	142	142	142	142	142	142	142	142	TRUE	
					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	158								TRUE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	158								TRUE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan	lembaga	234	234	234	234	234	234	234	234	TRUE	
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	234	234	234	234	234	234	234	234	TRUE	
					1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	120								TRUE	
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	120								TRUE	
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	174	174	174	174	174	174	174	174	TRUE	
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	174	174	174	174	174	174	174	174	TRUE	
					1.1.2.6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	233	233	233	233	233	233	233	233	TRUE	
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	233	233	233	233	233	233	233	233	TRUE	
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan	lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
					1.1.2.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	

	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
									lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan	lembaga	20	20	20	20	20	20	20	20	TRUE	
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	20	20	20	20	20	20	20	20	TRUE	
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	angka	32								TRUE	
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	angka	32								TRUE	
					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data:											
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	

	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
									jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
									jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	TRUE	
1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Katon	1.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kraton	Nilai Sakip Kemantren Kraton	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50)					- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,04)	A (86,04-89,04)	A (86,06-89,06)	A (86,08-89,08)	A (86,10-89,10)	A (86,12-89,12)	A (86,14-89,14)	A (86,16-89,16)	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,04)								TRUE	
			Nilai SPIP Kemantren Kraton						Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur 4,399	Terkelola dan Terukur 4,399-4,500	Terkelola dan Terukur 4,400-4,500	Terkelola dan Terukur 4,401-4,500	Terkelola dan Terukur 4,402-4,500	Terkelola dan Terukur 4,403-4,500	Terkelola dan Terukur 4,403-4,500	Terkelola dan Terukur 4,404-4,500	TRUE	
									Sumber data:											
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur 4,399								TRUE	
			Nilai IKM Kemantren Kraton						Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,66	86,66	87,00	87,25	87,50	87,75	87,75	88,00	TRUE	
									Sumber data:											
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,66								TRUE	
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kraton	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang wajib disusun x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang disusun tepat waktu	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13	TRUE	
									jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang wajib disusun	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13	TRUE	
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kraton		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
									Jumlah data statistik sektoral	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE	
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Kraton	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton		Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5								TRUE	

	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5								TRUE	
					1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Kraton	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kraton		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Kraton oleh BKPSDM	Nilai	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58	83,59	83,59	83,59	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Kraton oleh BKPSDM	Nilai	83,58								TRUE	
					1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kraton	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kraton		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	78,22	78,22	78,23	78,24	78,25	78,26	78,26	78,27	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	78,22								TRUE	
					1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kraton	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5								TRUE	
					1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Kraton	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kraton		Jumlah belanja Kemantren Kraton yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Kraton dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE	
									Sumber data :											
									Jumlah belanja Kemantren Kraton yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	11.582								TRUE	
									Jumlah belanja pada DPA Kemantren Kraton	Rupiah	11.582								TRUE	
					1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Kraton	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE	
									Sumber data :											
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kraton oleh BPKAD	Nilai	5								TRUE	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

JL Rotowijayan No. 6 Yogyakarta Kode Pos : 55132 Telp. (0274) 376795 Fax (0274) 376795
EMAIL : kt@jogja.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029
KEMANTREN GONDOMANAN

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kemantren Gondomanan telah selesai disusun. Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029 sebagai acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusunlah Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dalam menentukan arah, sasaran, strategi dan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di wilayah Kemantren Gondomanan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, terencana, terpadu sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, data dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini, sehingga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Gondomanan secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 September 2025
Mantri Pamong Praja Gondomanan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GONDOMANAN

Catya Wijayanta, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19701119 199603 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **6**

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **41**

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 41

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 42

3.3. Strategi Kemantren Gondomanan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029 45

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Gondomanan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029 49

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **51**

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan 51

4.2. Program Prioritas 85

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 91

BAB V PENUTUP **95**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN kemantren Gondomanan 15
Tabel 2.2 Data Pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 15
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana 16
Tabel 2.3.a Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2022 23
Tabel 2.4.b Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Gondomanann Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026..... 24
Tabel 2.4.c Pencapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2026 26
Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 34
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran..... 44
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 47
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra 50
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah..... 52
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025 - 2029..... 59
Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta 74
Tabel 4.3aDaftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 87
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 91
Tabel 4.5 Kategori dan Predikat Nilai Reformasi Birokrasi 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan..... 14
Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 43
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah..... 43

LAMPIRAN

Pohon kinerja kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

Cascading Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

Data Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah berakhir. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Wali kota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2030 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 harus memperhatikan SE Wali kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan rencana strategis memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.
8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Rencana Strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan Kemantren Gondomanan, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta 2025-2029 disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan Kemantren Gondomanan, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Rencana Strategis tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) untuk lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kematren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan:
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;

19. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali kota Kepada Mantri Pamong Praja; dan
21. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
22. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud & Tujuan

Penyusunan Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Yogyakarta dari aspek Keberdayaan Masyarakat dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan , serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan diselesaikan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan pedoman bagi Kemantren Gondomanan dalam menjabarkan visi misi Yogyakarta agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi misi tersebut yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta pada Renstra 2025-2029.
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Gondomanan yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kemantren Gondomanan; dan
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 Tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Kemantren Gondomanan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Gondomanan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Program Prioritas

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
m. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mantri Pamong Praja dibantu oleh;

A. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja, dipimpin oleh Mantri Anom. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
   b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
   c. membantu Mantri Pamong Praja dalam penkgoordinasian program kegiatan jawatan;
   d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
   e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
   f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
   g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
   h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
   i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
   j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
   k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kemantren;
   l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
   m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
   o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
   p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
d. pengelolaan aset Kemantren;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
c. penatausahaan keuangan Kemantren;
d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;

l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali kota di bidang pemerintahan umum;
e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* dalam rangka kegiatan pemerintahan;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan

Praja; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren.

Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali kota di bidang keamanan dan ketertiban;
g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan non yustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan

Keamanan;

t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

D. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang perekonomian dan pembangunan;
e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan

Kemakmuran;

t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;

d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;

f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;

h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota di bidang kesejahteraan masyarakat;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;

k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;

l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;

m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;

n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;

o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;

q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;

r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;

s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali kota di bidang pelayanan umum;
f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan sebagai berikut

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan beserta Kelurahan

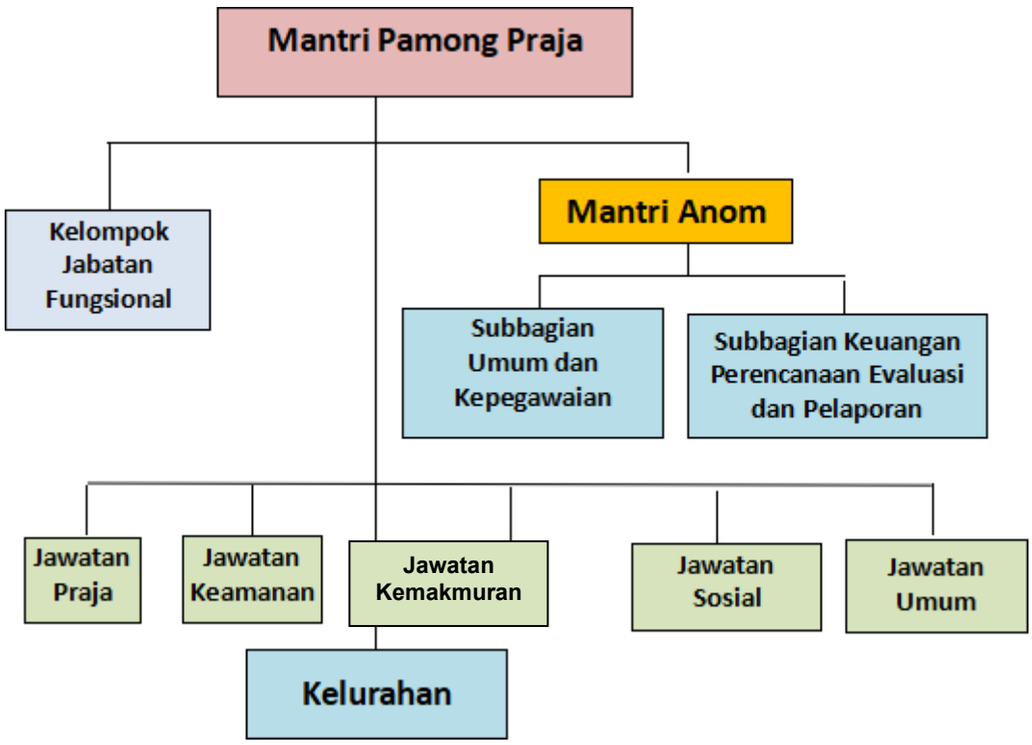

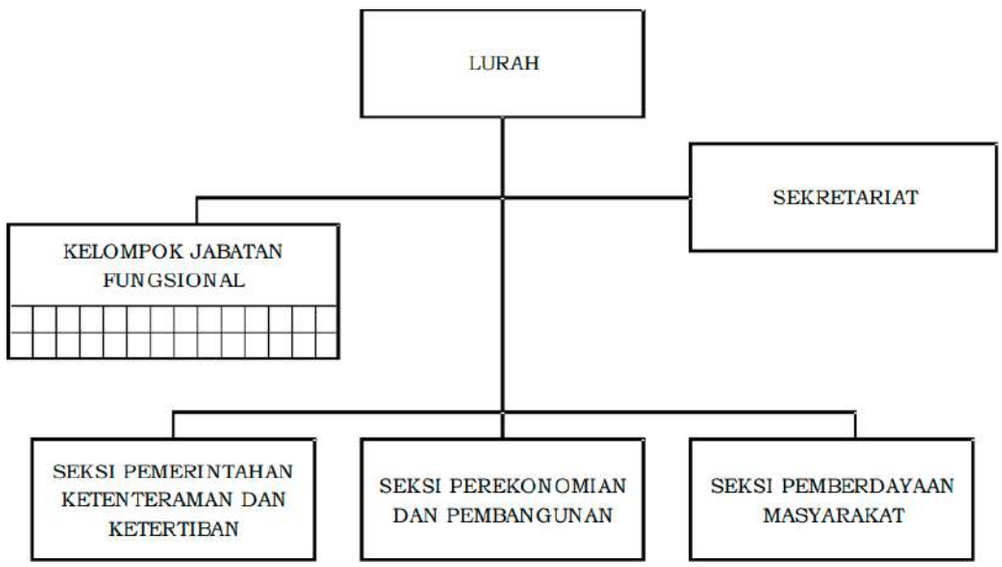

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
b. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
c. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
e. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja.
f. Masing-masing Jawatan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja.
g. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja.
h. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kemantren Gondomanan

Dalam menunjang ketugasannya, Kemantren Gondomanan didukung sumber daya manusia sebanyak 26 orang pegawai ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN kemantren Gondomanan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	2	1	1
2	S1	19	7	12
3	D III	4	1	3
4	SLTA	0	-	0
5	SLTP	1	-	1
6.	SD	0	-	-
	Jumlah	26	9	17

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2025

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Data Pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	0
2	Diklatpim IV	11	5	6
3	Pejabat Struktural yang belum diklat penjenjangan	3	1	2

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2025

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren Gondomanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yaitu bahwa penyelenggaraan

pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana dan/atau fasilitas yang bergerak maupun yang tidak bergerak. tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Adapun jumlah dan kondisi sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya di Kemantren Gondomanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
A. Kemantren Gondomanan			
1	Pompa Air	1	Baik
2	Mobil	1	baik
3	Sepeda Motor	9	baik
4	Motor Roda 3	1	baik
5	Sepeda	2	baik
6	Termometer Standar	3	baik
7	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	baik
8	Lemari Besi/Metal	1	baik
9	Lemari Kayu	5	baik
10	Rak Besi	12	baik
11	Rak Kayu	2	baik
12	Filing Cabinet Besi	11	baik
13	Brandkas	1	baik
14	Lemari Kaca	4	baik
15	LED Running text	1	baik
16	Alat Penghancur Kertas	5	baik
17	LCD Projector/Infocus	3	baik
18	Layar LCD Projector	1	baik
19	Meubelair	18	baik
20	Meja Kerja Kayu	20	baik
21	Meja Rapat	21	baik
22	Tempat Tidur Kayu	2	baik
23	Meja Panjang	2	baik
24	Meja 1/2 Biro	5	baik

25	Kursi Rapat	26	baik
26	Kursi Tamu	5	baik
27	Kursi Putar	11	baik
28	Kursi Lipat	114	baik
29	Meja Komputer	2	baik
30	Jam Dinding	4	baik
31	Lemari Es	1	baik
32	AC	6	baik
33	Kipas Angin	6	baik
34	Kompor Gas (Alat Dapur)	3	baik
35	Tabung Gas	3	baik
36	Wireless	2	baik
37	Televisi	4	baik
38	Loudspeaker	2	baik
39	Sound System	6	baik
40	Megaphone	1	baik
41	Microphone	5	baik
42	Lambang Garuda Pancasila	1	baik
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	baik
45	Dispenser	5	baik
46	Vertikal Blind	1	baik
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	baik
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	baik
49	Tripod Camera	1	baik
50	Camera Digital	2	baik
52	HT	2	baik
53	P.C Unit	23	baik
54	Note Book	2	baik
55	Monitor	1	baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	baik
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	baik

58	webcam	6	baik
60	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	baik
61	Lemari Kaca	4	baik
62	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Es III	1	baik
63	Meja dan Kursi Tamu	1	baik
B. Kelurahan Prawirodirjan			
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Sepeda	1	Baik
3	Termometer Standar	1	Baik
4	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik
6	Lemari Kayu	3	Baik
7	Rak Besi	2	Baik
8	Filing Cabinet Besi	6	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Lemari Kaca	3	Baik
11	Papan Visual/Papan Nama	9	Baik
12	LCD Projector	2	Baik
13	Layar LCD Projector	1	Baik
14	Meja Kerja Kayu	16	Baik
15	Meja Rapat	4	Baik
16	Kursi Besi/Metal	11	Baik
17	Kursi kayu	4	Baik
18	Meja Telepon	2	Baik
19	Kursi Putar	6	Baik
20	Bangku Tunggu	2	Baik
21	Kursi Lipat	74	Baik
22	Meja Komputer	1	Baik
23	Jam Dinding	8	Baik
24	Alat Pendingin	1	Baik
25	Lemari Es	1	Baik
26	Kipas Angin	2	Baik
27	Wireless	1	Baik

28	Televisi	1	Baik
31	Sound System	4	Baik
32	Megaphone	1	Baik
33	Microphone	2	Baik
34	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
36	Pataka	2	Baik
37	LED Running text	1	Baik
38	Tripod Camera	1	Baik
39	Camera Digital	1	Baik
40	Telepon	1	Baik
41	Telepon Selular	1	Baik
42	HT	1	Baik
43	P.C Unit	7	Baik
44	Note Book	1	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
46	webcam	2	Baik
47	White Board	1	Baik
48	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
49	AC	1	Baik
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
51	Scanner	1	Baik
52	Tangga Aluminium	1	Baik
53	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
54	Stand mic	2	Baik
55	Alat tenis meja	6	Baik
56	Smartcard reader	1	Baik
C. Kelurahan Ngupasan			
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Portable Water Pump	1	Baik
3	Termometer Standar	1	Baik
4	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik

6	Lemari Kayu	5	Baik
7	Rak Besi	3	Baik
8	Filing Cabinet Besi	3	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Papan Visual/Papan Nama	5	Baik
11	LCD Projector/Infocus	2	Baik
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
13	Meubelair	3	Baik
14	Meja Rapat	12	Baik
15	Kursi Rapat	14	Baik
16	Kursi Putar	7	Baik
17	Bangku Tunggu	2	Baik
18	Kursi Lipat	114	Baik
19	Jam Dinding	4	Baik
20	Alat Pendingin	1	Baik
22	Kipas Angin	7	Baik
23	Wireless	2	Baik
24	Televisi	2	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Megaphone	1	Baik
27	Wirelles	1	Baik
28	Tiang Bendera	1	Baik
29	Tangga Aluminium	1	Baik
30	Pataka	1	Baik
31	Dispenser	1	Baik
32	Vertikal Blind	1	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
34	LED Running text	1	Baik
35	Tripod Camera	1	Baik
36	Camera Digital	2	Baik
37	Telepon Selular	1	Baik

38	HT	1	Baik
39	P.C Unit	11	Baik
40	Note Book	1	Baik
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik
42	webcam	2	Baik
43	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	Baik
44	Alat Tenis Meja	6	Baik
45	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
46	Meja 1/2 Biro	1	Baik
48	AC	2	Baik
49	Lemari Kaca	1	Baik
50	Alat Peraga Edukasi	12	Baik
51	Server	1	Baik
52	Modem	1	Baik
53	Smartcard reader	1	Baik

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam Renstra Periode 2023-2026 dalam rangka mendukung urusan tersebut ditetapkan dua tujuan Kemantren Gondomanan yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 367,36 poin sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 390 poin.
2. Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah A sedangkan target pada akhir Renstra sesuai dengan Review Renstra adalah A.

Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatknya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan.

Sasaran Strategis tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah 367,36 sedangkan target sasaran pada akhir Renstra adalah 390.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah A sedangkan target pada akhir Renstra sesuai denga Review Renstra adalah A. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh program kegiatan yang diampu oleh Kemantren Gondomanan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan target dan realisasi lima tahun terakhir (2020-2024) sebagaima tertuang dalam tabel di bawah ini:

Pencapaian kinerja pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3a

Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022	
							Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Tujuan Daerah 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta **VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan** **MISI 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat**												
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren/ Kecamatan Gondomanan	Berdasarkan evaluasi perkembangan kelurahan (sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015)	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	366	367	366.5	367	367	367.36
						RPJMD	~~356~~	-	~~358~~	-	~~360~~	
						Review 2018	~~356~~	-	~~358~~	-	~~360~~	
						Review 2019	~~366~~	-	~~366.5~~	-	~~367~~	
						Review 2020	366	367	366.5	367	367	367.36
						Sumber Data :						
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Ngupasan	360	364	365	358	365	367.65
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prawirodirjan	362	370	368	376	369	367.075
						- Jumlah kelurahan	2	2	2	2	2	2

Tabel 2.4.b.

Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Gondomanann Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		2024	
Review 2021 Program Berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020						**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dihitung dari Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Ngupasan ditambah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Prawirodirjan dibagi 2	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	367,36 poin	368,00	368,30	369	369,6
			RPD	Poin	367,36 poin	368,00	368,00	~~369 poin~~	-
			Review 2024	Poin				369	369,6
			Sumber data :						
			- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Ngupasan	poin	367,65	368	368	369	369,8
			- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prawirodirjan	poin	367,075	368	368,6	369	369,4
			- Jumlah kelurahan	Kelurahan	2	2	2	2	2
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60)	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	**Nilai**	A	A	AA	A	A

		C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30) Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomer 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomer 9 karena tidak mengamanatkan RB level OPD sehingga disempurnakan dengan Kepwal.							
			RPD	Poin	~~60 poin~~	~~61 poin~~	-	~~62 poin~~	-
			Review 2023	**Nilai**	A	A	AA	~~A~~	-
			Review 2024	Nilai	-	-	-	A	A
			Sumber Data:						
			Hasil penilaian RB GM oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja GM 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) GM 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset GM 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN GM 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Poin	80,19 poin	81 poin	94,44	81 poin	89,76 poin

Tabel 2.4.c

Pencapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target							Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW 2)
Program Penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,70 poin	87,90 poin	88,57 poin	88,62 poin	88,70 poin	88,75 poin	88,80 poin	88,51 poin	88,57 poin	88,62 poin	88,68 poin	88,72 poin	88,73 poin
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	460.000 .000 rupiah	469.200. 000 rupiah	478.584. 000 rupiah	1.032.240 .000 rupiah	1.044.024 .000 rupiah	1.061.035 .000 rupiah	1.073.276. 000p7 rupiah	759.386. 500 rupiah	960.512. 500 rupiah	515.392. 000 rupiah	1.039.317 .000 rupiah	1.049.185 .000 rupiah	528.278 .000 rupiah
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	-	160	157	140	130	120	110	155	145		136	127	85
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gondomanan pada awal Tahun 2020 dalam Renstra 2017-2022 memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai Survey Kepuasanan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat, kemudian pada Tahun 2020 tersebut ada review indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada Tahun 2021 dilakukan review renstra yaitu review indikator program berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan menjadi 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan indikator program bertambah 1 (satu) yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga ada 3 (tiga) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Gondomanan menurun dengan indikator jumlah pelanggaran perda menurun dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Berdasarakan tabel penyandingan di atas capaian periode Renstra 2017- 2022 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program sampai dengan Tahun 2022 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antara pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Gondomanan dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan.

Sementara untuk capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024 ditayangkan dalam tabel yang berbeda karena periode Renstranya berbeda yaitu Periode Renstra 2023-2026. Dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Gondomanan ada perubahan, di periode Renstra Tahun 2017-2022 hanya ada satu IKU yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dari sasaran Strategis Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dengan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat, sementara di periode Renstra Tahun 2023-2026 ada dua IKU dari dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan mendukung Misi Kota Yogyakarta.

Misi 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, dan Misi 6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum. Sehingga dalam penyandingan target Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena

berbeda periode Renstra tersebut mengalami sedikit kesulitan, sehingga untuk secara sederhananya tersaji seperti tabel di atas.

Dari capaian 5 lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran dan indikator program setiap tahunnya sudah melebihi dari yang di targetkan. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Didukung oleh program kegiatan di Kemantren Gondomanan dan partisipasi warga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kemantren Gondomanan tersebut;
2. Kepemimpinan Mantri Pamong Praja dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan kepada mitra kerja pemerintah dan warga mayarakat untuk mendukung dan menyukseskan program dan kegiatan di Kemantren Gondomanan dan juga dengan dukungan lewat swadaya masyarakat total;
3. Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Mantri Pamong Praja, Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang;
4. Semangat warga masyarakat untuk membangun wilayahnya;
5. Koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Forkompimtren dan juga OPD terkait dapat terlaksana dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Kemantren Gondomanan;

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan dan Mitra Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Dalam pelaksanaan pelayanan sebagai fungsi dan ketugasan pokok pelayanan menyasar kelompok sasaran berbagai lembaga masyarakat di wilayah Kemantren Gondomanan, antara lain RT, RW, LPMK, PKK tingkat RT, PKK tingkat RW, PKK tingkat Kelurahan dan PKK tingkat Kemantren, POKJA Bunda PAUD, Himpaudi, IPSM, KORMAN, Perwosi, Karang Taruna, TP UKAS, Tim Penangkis, FPK, PWRI, Paguyuban Kesenian Kemantren, Pokjanal Posyandu, FKKS, FKI, TPKJM, FPKK, UMKM, Bank sampah, Komisi Lansia dan lain-lain.

Secara rinci kelompok sasaran ini meliputi:

1. Seluruh penduduk di Kemantren Gondomanan

   Setiap individu yang tinggal di wilayah Kemantren Gondomanan, baik warga asli maupun pendatang, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia.
2. Keluarga

   Kemantren juga berperan dalam menangani berbagai permasalahan keluarga, seperti kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.
3. Kelompok Masyarakat

   Kemantren Gondomanan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti RT/RW, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok rentan.
4. Pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan

   Ini termasuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, bantuan sosial, serta informasi dan edukasi terkait berbagai program pemerintah.

Dengan demikian, Kemantren Gondomanan hadir untuk melayani dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya serta memastikan terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban umum.

Untuk pelaksanaan fungsi dan ketugasan pokok dalam rangka pelayanan, Kemantren Gondomanan juga berkoordinasi dan melibatkan perangkat daerah lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan, antara lain Bapeda, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi dan Pembangunan, Bagian PBJ, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan DPUPKP. Selain itu dalam forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimtren) wilayah kemantren Gondomanan juga melibatkan KUA Gondomanan, Puskesmas Gondomanan, Koramil Gondomanan dan Polsek Gondomanan.

Mitra Perangkat Daerah dari Kemantren Gondomanan antara lain:

- Koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dalam perencanaan anggaran dan evaluasi serta pelaporan keuangan.
- Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- Koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren Gondomanan.
- Koordinasi dengan Satpol PP terkait dengan operasi ketertiban dalam menanggulangi pelanggaran perda.
- Koordinasi dengan Dinas Kominfosan terkait pelayanan jaringan internet, CCTV dan data sektoral.
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam program pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Kemantren Gondomanan.
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tingkat Kemantren Gondomanan.
- Koordinasi dengan Dinas Sosial dalam program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- Kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di tingkat Kemantren Gondomanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kemantren didasarkan pada Peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali kota diatur dalam Peraturan Wali kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Pasal 2 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 menyebutkan Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan masyarakat. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan ada beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Pemberdayaan Masyarakat belum merata

   Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan. Namun dalam praktiknya, pemberdayaan sering kali tidak merata, menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses dan manfaat yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

2. Pelestarian Cagar Budaya dan Adat Budaya di Tengah modernisasi

   Modernisasi dan globalisasi membuat nilai adat sering ditinggalkan serta kurangnya regenerasi pelaku budaya untuk melestarikan budaya, upacara adat serta kesenian menjadi tantangan tersendiri bagi Kemantren Gondomanan. Selain itu pelestarian cagar budaya dan tata ruang di wilayah Kemantren Gondomanan juga menjadi catatan penting untuk tetap bisa dijaga kelestariannya, mengingat Kemantren Gondomanan terletak di Kawasan Sumbu Filosofi.

3. Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah Kemantren Gondomanan. Melalui Penyelenggaraan Pelatihan dan pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi SDM.

4. Penanganan sampah belum optimal

   Penanganan sampah di Kemantren Gondomanan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran warga dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Selain itu masih ada beberapa warga yang enggan berlangganan penggerobak dengan alasan biaya langganan. Hal tersebut

membuat masih ditemukannya titik-titik sampah liar di wilayah Kemantren Gondomanan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam pemenuhan fungsinya di bidang pelayanan, Kemantren Gondomanan senantiasa berusaha menangkap berbagai isu-isu strategis yang dihadapi untuk menjawab kebutuhan untuk peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat Kemantren Gondomanan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat Afirmasi Gender

   Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Gondomanan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin termasuk anak-anak dengan kondisi stunting.

   Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kemantren Gondomanan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusi dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut. Selain itu, Kemantren Gondomanan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Gondomanan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

   Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

   Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu

sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin dan difabel (Pengarusutamaan Gender). Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan

2. Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi

   Kemantren Gondomanan dan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah dua hal yang saling terkait. Sumbu Filosofi adalah garis imajiner yang menghubungkan Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak, dan Kemantren Gondomanan merupakan salah satu wilayah yang terletak di sepanjang sumbu tersebut. Sumbu Filosofi memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat Jawa, yang melambangkan perjalanan manusia dari lahir hingga kembali ke Sang Pencipta.

   Kemantren Gondomanan ikut mengkondisikan cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi. Kondisi saat ini semakin luntur adat istiadat Jawa (unggah-ungguh) di tengah masyarakat terbukti anak-anak kecil dan remaja dalam kehidupan sehari-hari kurang memahami dari bahasa, adat istiadat, dan sopan santun Jawa.

   Upaya pelestarian adat melalui penguatan Seni, Adat dan Budaya di berbagai kegiatan baik di Kemantren maupun Kelurahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan seni seperti pelatihan kethoprak, karawitan serta barongsai serta pelestarian upacara-upacara adat seperti festival apem.

3. Pembangunan kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren Gondomanan selain kemampuan keuangan atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

4. Penanganan sampah dengan tertib dalam membuang sampah, memilah sampah dan mengelola sampah.

   Dengan adanya pengaturan mekanisme pembuangan sampah ke depo maka kemungkinan ada warga Masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga perlu adanya pengawasan dan pembinaan kepada warga Masyarakat agar tertib dalam membuang sampah, serta aktif memilah sampah organik dan

anorganik. Sampah organik dikelola di masing-masing rumah tangga, sampah anorganik dikelola di bank sampah.

Teknis menyimpulkan Isu Strategis Kemantren Gondomanan seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis, yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan-pelatihan - Sosial, melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	memastikan pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka diperhatikan dalam setiap tahapan	memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembangunan, serta perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	mengupayakan kebijakan, rencana, dan program pembangunan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi mereka	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender
- Kemantren Gondomanan berperan penting dalam menjaga dan melestarikan kawasan sumbu filosofi ini, termasuk kebersihan dan keberlanjutannya, serta mendukung upaya menjadikan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia.	Pelestarian Cagar Budaya dan Adat Budaya di Tengah modernisasi	Budaya DIY dan nilai-nilai keistimewaan	Memastikan bahwa warisan budaya, seperti Sumbu Filosofi, tetap lestari dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi fokus, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan pelestarian warisan budaya	Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan pelatihan peningkatan perekonomian kepada UMKM dan warga masyarakat - Sosial melibatkan seluruh kalangan dalam	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi - Tantangan terhadap pendidikan dan kualitas SDM yang berdaya saing	memastikan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta meningkatkan	memastikan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan	memastikan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan juga peningkatan kualitas SDM. memastikan bahwa rencana pembangunan, termasuk yang berfokus	Pembangunan kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	di wilayah	global	kualitas hidup manusia	kebutuhan pasar kerja.	pada peningkatan SDM, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial	
- Pemilahan sampah Tingkat rumah tangga sudah dilakukan dan Bank sampah sudah terbentuk di masing-masing RW. Pembuangan sampah sudah melalui penggerobag.	Penanganan sampah belum optimal	- Pengelolaan persampahan belum optimal	Pengelolaan sampah, polusi udara dan air. Isu sampah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dan upaya pengurangan sampah dari sumbernya	pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan, bagaimana mengurangi timbunan sampah, dan meningkatkan penanganan sampah.	dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak optimal, termasuk volume sampah yang terus meningkat dan kurangnya infrastruktur pengumpulan serta pembuangan yang memadai.	Penanganan sampah dengan tertib dalam membuang sampah , memilah sampah dan mengelola sampah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

Untuk menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan yang merupakan dokumen perencanaan OPD Kemantren Gondomanan 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi OPD sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Tujuan Kemantren Gondomanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondomanan, dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan, dengan formula perhitungan: 80 % nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren + 20 % nilai Evaluasi Kinerja Kemantren

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 18 (7) diatur untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;

b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang. Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) adalah proses sistematis untuk menilai kinerja seorang Mantri Pamong Praja dan seluruh perangkat Kemantren dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren di Pemerintah Kota Yogyakarta. EKK bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

EKK dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kemantren, serta untuk meningkatkan kinerja Mantri Pamong Praja dan perangkatnya. EKK melibatkan tim evaluasi yang melakukan penilaian secara sistematis terhadap kinerja Kemantren berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.

EKK mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Kemantren. Hasil EKK dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan pengawasan, memberikan penghargaan kepada Kemantren yang berprestasi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Tujuan Kemantren Gondomanan Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan dengan indikator Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan, pada awal Renstra target indikator tujuan adalah 497,20 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 517,20.

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Kemantren Gondomanan ada 2 sasaran dengan masing-masing indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan, dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan target pada awal Renstra adalah 385 dan target pada akhir Renstra adalah 410.

   Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif, dengan indikator kinerja nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan. Sasaran Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang Baik dan Adaptif target pada awal Renstra A (89,77 – 90,00) dan target pada akhir Renstra adalah A (89,81 – 90,00).

   Perumusan tujuan dan sasaran berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan dan sasaran ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Berikut Gambaran Konsep Renstra Perangkat Daerah kemantren Gondomanan sebagai berikut.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

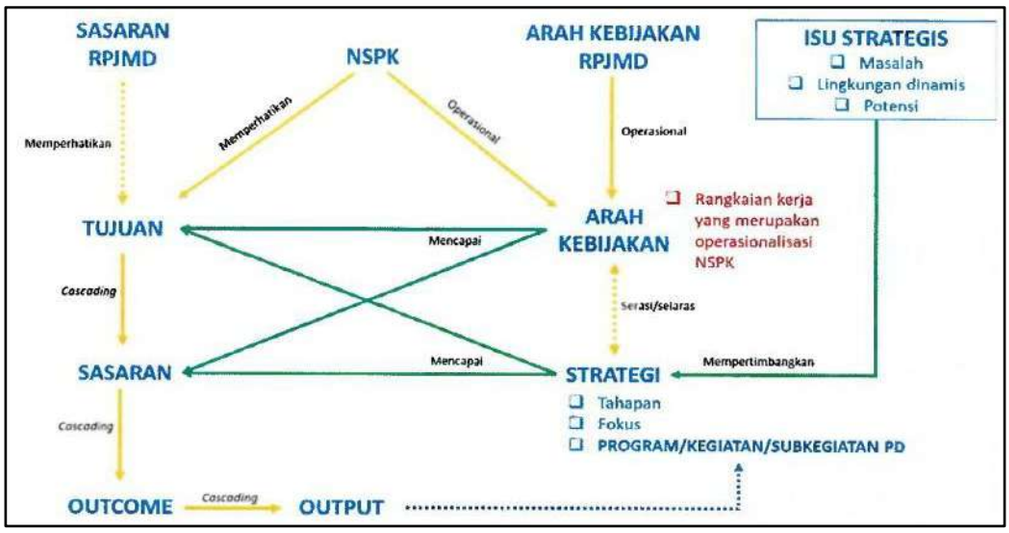

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

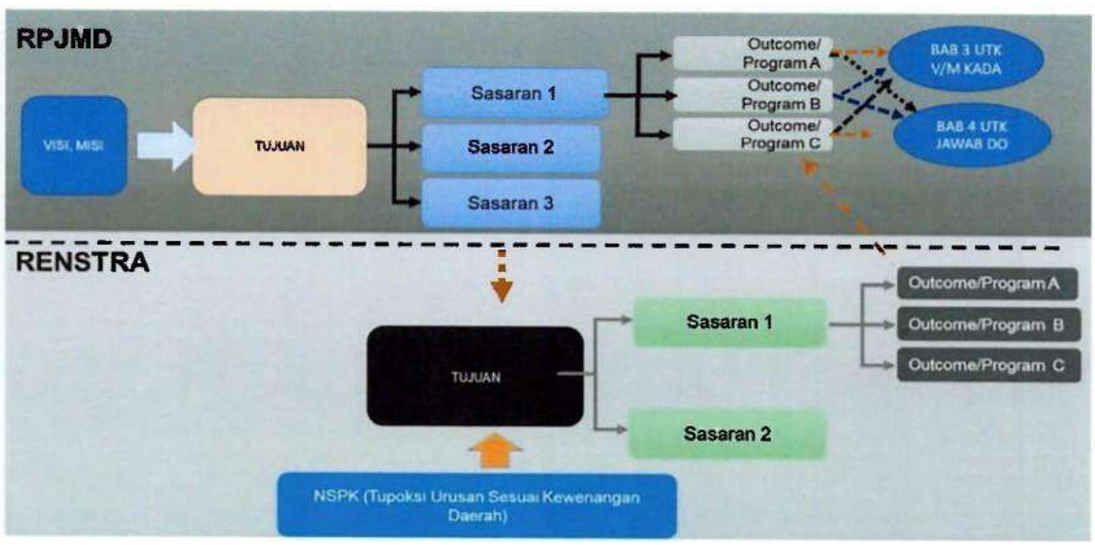

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
KEMANTREN GONDOMANAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan											
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondomanan		Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan (Poin)	484.88	497.20	505.20	509.20	513.20	517.20	517.20	
		Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan (poin)	369.6	385	395	400	405	410	410	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3. Strategi Kemantren Gondomanan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka mengengah Kota Yogyakarta 2025-2029 yaitu Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Penetapan Strategi pembangunan menekankan pada langkah-langkah pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Renstra yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

3.3.1 Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. RPJMD 2025- 2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka

panjang, RPJMD 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

   Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah *Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029* dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

   Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

   Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam

kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai *Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029* pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai- Nilai Keistimewaan".

3.3.2 Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode tahun 2025–2029, Kemantren Gondomanan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan di wilayah Kemantren Gondomanan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Gondomanan pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan bagi warga masyarakat di wilayah Kemantren Gondomanan.

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Gondomanan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari aspek strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Arah kebijakan dalam Kemantren Gondomanan tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari Misi dan Aspek Strategi dalam pembangunan jangka menengah Kemantren Gondomanan tahun 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kemantren Gondomanan

No	Operasionalsasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Peningkatan perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondomanan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kemantren	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan sinergitas *stakeholder* penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tahunan setiap tahun akan dijabarkan dalan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sering disebut Rencana Kerja (Renja) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta setiap tahun. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta setiap tahun harus mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Yogyakarta 2025-2029, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kemantren, Pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota Yogyakarta, Perumusan masalah dan Isu strategis Kemantren Gondomanan pada Periode 2025-2029 akan melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta harus mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program. Dari 7 Program tersebut, semua program diorientasikan mendukung program Prioritas Nasional yaitu " Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Uraian dari 7 Program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Gondomanan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Gondomanan	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Ngupasan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Prawirodirjan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
7.01 - KECAMATAN					9.359.730.997		9.550.101.723		9.792.501.073		10.058.716.529		10.405.092.455	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.735.378.750		6.872.371.890		7.046.805.475		7.238.377.427		7.487.633.847	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondomanan	Nilai SPIP Kemantren Gondomanan (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	6.735.378.750	Terkelola dan Terukur	6.872.371.890	Terkelola dan Terukur	7.046.805.475	Terkelola dan Terukur	7.238.377.427	Terkelola dan Terukur	7.487.633.847	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Kemantren Gondomanan (Nilai)	A	A	A		A		A		A		A		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM Kemantren Gondomanan (Nilai)	88,72	88,75	88,8		88,85		88,9		88,95		88,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.813.250		8.992.506		9.220.752		9.471.424		9.797.577	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan (Poin)	116	116,25	116,5	8.813.250	116,75	8.992.506	117	9.220.752	117,25	9.471.424	117,25	9.797.577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.409.643.997		2.458.654.559		2.521.059.786		2.589.596.422		2.678.770.210	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	180	180,25	180,5	410.041.698	180,75	418.382.349	181	429.000.892	181,25	440.665.426	181,25	455.824.153	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan)					831.592.600		848.506.362		870.043.741		893.694.740		924.476.526	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Prawirodirjan)					1.168.009.699		1.191.765.848		1.222.015.153		1.255.236.256		1.298.469.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					135.270.000		138.021.302		141.524.540		145.371.975		150.377.918	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondomanan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	135.270.000	100	138.021.302	100	141.524.540	100	145.371.975	100	150.377.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					70.625.000		72.061.466		73.890.520		75.899.281		78.512.903	
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondomanan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	70.625.000	100	72.061.466	100	73.890.520	100	75.899.281	100	78.512.903	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					9.669.730.997.00		9.860.101.723.00		10.102.501.073.00		10.368.716.529.00		10.715.092.455.00	

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Dari 7 Program tersebut, semua program diorientasikan mendukung program Prioritas Nasional yaitu " Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Budaya Yogyakarta, dengan target 1 dokumen.

   Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1)Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksananaan, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penerapan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi, dengan target 1 dokumen. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

   Program ini dilaksanakan oleh 2 kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan dan Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan oleh Jawatan kemakmuran
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Ngupasan
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Prawirodirjan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan, dengan target A Nilai. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Bapeda, BPKAD, Bagian Adminbang, Bagian Organisasi, Bagian PBJ, dan BKPSDM

Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4)Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5)Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kominfosan, Dinas Dukcapil dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Sosial, DPUPKP, DLH, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Bagian PBJ, DPUPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan kedua Kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp.89.440.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2) Evaluasi Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan
4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan
5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kominfosan, DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan KUA, Dinas Kesehatan (puskesmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kemantren Gondomanan dan dua sasaran yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dan sasaran kedua Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam Tabel berikut:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA KEMANTREN GONDOMANAN TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondomanan				Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan		
		Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondomanan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondomanan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondomanan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondomanan		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Prawirodirjan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Ngupasan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Ngupasan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Prawirodirjan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Ngupasan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Ngupasan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Ngupasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Ngupasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Ngupasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Prawirodirjan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan)	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Ngupasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Prawirodirjan)			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan)			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondomanan		Nilai SPIP Kemantren Gondomanan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Sakip Kemantren Gondomanan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Gondomanan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondomanan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	30.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Ngupasan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Ngupasan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Prawirodirjan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Gondomanan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01 - KECAMATAN				6.629.158.278,00		9.359.730.997,00		9.550.101.723,00		9.792.501.073,00		10.058.716.529,00		10.405.092.455,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.014.426.580,00		6.735.378.750,00		6.872.371.890,00		7.046.805.475,00		7.238.377.427,00		7.487.633.847,00		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondomanan	Nilai SPIP Kemantren Gondomanan	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	6.014.426.580,00	Terkelola dan Terukur	6.735.378.750,00	Terkelola dan Terukur	6.872.371.890,00	Terkelola dan Terukur	7.046.805.475,00	Terkelola dan Terukur	7.238.377.427,00	Terkelola dan Terukur	7.487.633.847,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
	Nilai IKM Kemantren Gondomanan	88.72	88.75		88.8		88.85		88.9		88.95		88.95			
	Nilai Sakip Kemantren Gondomanan	A	A		A		A		A		A		A			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.993.000,00		60.629.000,00		61.862.132,00		63.432.195,00		65.151.206,00		67.366.347,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	73.993.000,00	1	60.629.000,00	1	61.862.132,00	1	63.432.195,00	1	65.151.206,00	1	67.366.347,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.250.000,00		4.200.000,00		4.285.424,00		4.394.188,00		4.513.270,00		4.666.722,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	8.250.000,00	5	4.200.000,00	5	4.285.424,00	5	4.394.188,00	5	4.513.270,00	5	4.666.722,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.505.000,00		2.585.000,00		2.637.576,00		2.704.518,00		2.777.810,00		2.872.256,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.505.000,00	1	2.585.000,00	1	2.637.576,00	1	2.704.518,00	1	2.777.810,00	1	2.872.256,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.360.000,00		1.920.000,00		1.959.051,00		2.008.772,00		2.063.209,00		2.133.358,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.360.000,00	1	1.920.000,00	1	1.959.051,00	1	2.008.772,00	1	2.063.209,00	1	2.133.358,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				39.908.000,00		40.844.000,00		41.674.726,00		42.732.431,00		43.890.480,00		45.382.756,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	39.908.000,00	1	40.844.000,00	1	41.674.726,00	1	42.732.431,00	1	43.890.480,00	1	45.382.756,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.500.000,00		2.700.000,00		2.754.915,00		2.824.835,00		2.901.388,00		3.000.035,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.500.000,00	1	2.700.000,00	1	2.754.915,00	1	2.824.835,00	1	2.901.388,00	1	3.000.035,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.650.000,00		3.650.000,00		3.724.237,00		3.818.758,00		3.922.247,00		4.055.603,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	6.650.000,00	3	3.650.000,00	3	3.724.237,00	3	3.818.758,00	3	3.922.247,00	3	4.055.603,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.820.000,00		4.730.000,00		4.826.203,00		4.948.693,00		5.082.802,00		5.255.617,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	12	6.820.000,00	12	4.730.000,00	12	4.826.203,00	12	4.948.693,00	12	5.082.802,00	12	5.255.617,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.648.927.000,00		5.208.784.000,00		5.314.727.729,00		5.449.628.305,00		5.597.803.214,00		5.790.586.924,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	4.633.287.000,00	2	5.208.784.000,00	2	5.314.727.729,00	2	5.449.628.305,00	2	5.597.803.214,00	2	5.790.586.924,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0		0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31		31		31		31		31		31			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.633.287.000,00		5.197.209.000,00		5.302.917.304,00		5.437.518.133,00		5.585.364.250,00		5.777.725.036,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	4.633.287.000,00	31	5.197.209.000,00	31	5.302.917.304,00	31	5.437.518.133,00	31	5.585.364.250,00	31	5.777.725.036,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						-		-		-		-		-		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.175.000,00		2.475.000,00		2.525.339,00		2.589.432,00		2.659.735,00		2.750.166,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	5.175.000,00	2	2.475.000,00	2	2.525.339,00	2	2.589.432,00	2	2.659.735,00	2	2.750.166,00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.600.000,00		2.200.000,00		2.244.746,00		2.301.717,00		2.364.209,00		2.444.592,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	4.600.000,00	2	2.200.000,00	2	2.244.746,00	2	2.301.717,00	2	2.364.209,00	2	2.444.592,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.300.000,00		2.300.000,00		2.346.780,00		2.406.341,00		2.471.673,00		2.555.710,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2.300.000,00	2	2.300.000,00	2	2.346.780,00	2	2.406.341,00	2	2.471.673,00	2	2.555.710,00		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.725.000,00		2.760.000,00		2.816.136,00		2.887.609,00		2.966.008,00		3.066.852,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	1.725.000,00	4	2.760.000,00	4	2.816.136,00	4	2.887.609,00	4	2.966.008,00	4	3.066.852,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.840.000,00		1.840.000,00		1.877.424,00		1.925.073,00		1.977.339,00		2.044.568,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	1.840.000,00	4	1.840.000,00	4	1.877.424,00	4	1.925.073,00	4	1.977.339,00	4	2.044.568,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				920.000,00		440.000,00		448.949,00		460.343,00		472.773,00		489.055,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	920.000,00	4	440.000,00	4	448.949,00	4	460.343,00	4	472.773,00	4	489.055,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				920.000,00		440.000,00		448.949,00		460.343,00		472.773,00		489.055,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	920.000,00	4	440.000,00	4	448.949,00	4	460.343,00	4	472.773,00	4	489.055,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				690.000,00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.645,00		366.859,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2	690.000,00	2	330.000,00	2	336.712,00	2	345.258,00	2	354.645,00	2	366.859,00		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				690.000,00		330.000,00		336.712,00		345.258,00		354.645,00		366.859,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2	690.000,00	2	330.000,00	2	336.712,00	2	345.258,00	2	354.645,00	2	366.859,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.010.130,00		148.836.700,00		151.863.890,00		155.718.195,00		159.952.174,00		165.460.927,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	160.010.130,00	5	148.836.700,00	5	151.863.890,00	5	155.718.195,00	5	159.952.174,00	5	165.460.927,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.466.600,00		4.945.500,00		5.046.087,00		5.174.156,00		5.314.842,00		5.497.885,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	4.466.600,00	5	4.945.500,00	5	5.046.087,00	5	5.174.156,00	5	5.314.842,00	5	5.497.885,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.900.080,00		60.805.750,00		62.042.478,00		63.617.116,00		65.346.866,00		67.597.412,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	34.900.080,00	3	60.805.750,00	3	62.042.478,00	3	63.617.116,00	3	65.346.866,00	3	67.597.412,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.651.450,00		28.601.450,00		29.183.175,00		29.923.844,00		30.737.473,00		31.796.072,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	27.651.450,00	3	28.601.450,00	3	29.183.175,00	3	29.923.844,00	3	30.737.473,00	3	31.796.072,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				92.992.000,00		54.484.000,00		55.592.150,00		57.003.079,00		58.552.993,00		60.569.558,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	92.992.000,00	12	54.484.000,00	12	55.592.150,00	12	57.003.079,00	12	58.552.993,00	12	60.569.558,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				92.827.800,00		78.268.900,00		79.860.812,00		81.887.678,00		84.114.205,00		87.011.098,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	14	92.827.800,00	14	78.268.900,00	14	79.860.812,00	14	81.887.678,00	14	84.114.205,00	14	87.011.098,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62	135		73		100		100		100		100			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				27.000.000,00		28.220.000,00		28.793.967,00		29.524.757,00		30.327.536,00		31.372.016,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62	135	27.000.000,00	73	28.220.000,00	100	28.793.967,00	100	29.524.757,00	100	30.327.536,00	100	31.372.016,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.827.800,00		50.048.900,00		51.066.845,00		52.362.921,00		53.786.669,00		55.639.082,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	14	65.827.800,00	14	50.048.900,00	14	51.066.845,00	14	52.362.921,00	14	53.786.669,00	14	55.639.082,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				803.846.750,00		807.890.750,00		824.322.440,00		845.243.744,00		868.225.921,00		898.127.622,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	803.846.750,00	1	807.890.750,00	1	824.322.440,00	1	845.243.744,00	1	868.225.921,00	1	898.127.622,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	24		24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.530.509,00		1.569.353,00		1.612.024,00		1.667.542,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.530.509,00	1	1.569.353,00	1	1.612.024,00	1	1.667.542,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.700.000,00		134.700.000,00		137.439.663,00		140.927.882,00		144.759.711,00		149.745.236,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	134.700.000,00	12	134.700.000,00	12	137.439.663,00	12	140.927.882,00	12	144.759.711,00	12	149.745.236,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.646.750,00		671.690.750,00		685.352.268,00		702.746.509,00		721.854.186,00		746.714.844,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	24	667.646.750,00	24	671.690.750,00	24	685.352.268,00	24	702.746.509,00	24	721.854.186,00	24	746.714.844,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.211.900,00		430.199.400,00		438.949.226,00		450.089.757,00		462.303.289,00		478.225.015,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Gondomanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	233.211.900,00	17	430.199.400,00	17	438.949.226,00	17	450.089.757,00	17	462.303.289,00	17	478.225.015,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	123		123		123		123		123		123			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.640.000,00		23.640.000,00		24.120.814,00		24.733.000,00		25.405.490,00		26.280.456,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	23.640.000,00	17	23.640.000,00	17	24.120.814,00	17	24.733.000,00	17	25.405.490,00	17	26.280.456,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.170.000,00		68.179.400,00		69.566.101,00		71.331.688,00		73.271.197,00		75.794.657,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	66.170.000,00	4	68.179.400,00	4	69.566.101,00	4	71.331.688,00	4	73.271.197,00	4	75.794.657,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.700.000,00		54.220.000,00		55.322.781,00		56.726.873,00		58.269.276,00		60.276.070,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	123	27.700.000,00	123	54.220.000,00	123	55.322.781,00	123	56.726.873,00	123	58.269.276,00	123	60.276.070,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				115.701.900,00		284.160.000,00		289.939.530,00		297.298.196,00		305.357.326,00		315.873.832,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	115.701.900,00	2	284.160.000,00	3	289.939.530,00	3	297.298.196,00	3	305.357.326,00	3	315.873.832,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.872.250,00		8.813.250,00		8.992.506,00		9.220.752,00		9.471.424,00		9.797.577,00		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan	116	116	16.872.250,00	116.50	8.813.250,00	116.75	8.992.506,00	117	9.220.752,00	117.25	9.471.424,00	117.25	9.797.577,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.840.000,00		880.000,00		897.899,00		902.334,00		926.869,00		958.790,00		
Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	4	1.840.000,00	4	880.000,00	4	897.899,00	4	902.334,00	4	926.869,00	4	958.790,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.840.000,00		880.000,00		897.899,00		902.334,00		926.869,00		958.790,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	4	1.840.000,00	4	880.000,00	4	897.899,00	4	902.334,00	4	926.869,00	4	958.790,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.032.250,00		7.933.250,00		8.094.607,00		8.318.418,00		8.544.555,00		8.838.787,00		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	15.032.250,00	12	7.933.250,00	12	8.094.607,00	12	8.318.418,00	12	8.544.555,00	12	8.838.787,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				15.032.250,00		7.933.250,00		8.094.607,00		8.318.418,00		8.544.555,00		8.838.787,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	15.032.250,00	12	7.933.250,00	12	8.094.607,00	12	8.318.418,00	12	8.544.555,00	12	8.838.787,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.264.203.085,00		2.409.643.997,00		2.458.654.559,00		2.521.059.786,00		2.589.596.422,00		2.678.770.210,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	180	180	380.479.448,00	180.50	410.041.698,00	180.75	418.382.349,00	181	429.000.892,00	181.25	440.665.426,00	181.25	455.824.153,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				89.820.000,00		81.640.000,00		83.300.476,00		85.414.642,00		87.737.066,00		90.746.448,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	89.820.000,00	2	81.640.000,00	2	83.300.476,00	2	85.414.642,00	2	87.737.066,00	2	90.746.448,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				89.820.000,00		81.640.000,00		83.300.476,00		85.414.642,00		87.737.066,00		90.746.448,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	89.820.000,00	2	81.640.000,00	2	83.300.476,00	2	85.414.642,00	2	87.737.066,00	2	90.746.448,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.926.286.085,00		2.036.669.747,00		2.078.093.573,00		2.130.840.163,00		2.188.766.728,00		2.264.152.137,00		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	23	54.562.448,00	21	37.067.448,00	21	37.821.363,00	21	38.781.269,00	21	39.835.732,00	21	41.206.080,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				49.592.272,00		25.517.272,00		26.036.268,00		26.697.068,00		27.422.962,00		28.366.311,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	23	49.592.272,00	21	25.517.272,00	21	26.036.268,00	21	26.697.068,00	21	27.422.962,00	21	28.366.311,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				4.970.176,00		11.550.176,00		11.785.095,00		12.084.201,00		12.412.770,00		12.839.769,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3	3	4.970.176,00	3	11.550.176,00	3	11.785.095,00	3	12.084.201,00	3	12.412.770,00	3	12.839.769,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.980.000,00		94.660.500,00		96.585.800,00		99.037.147,00		101.729.967,00		105.229.643,00		
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2	6.680.000,00	2	3.840.000,00	2	3.918.102,00	2	4.017.543,00	2	4.126.780,00	2	4.268.906,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.680.000,00		3.840.000,00		3.918.102,00		4.017.543,00		4.126.780,00		4.268.906,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2	6.680.000,00	2	3.840.000,00	2	3.918.102,00	2	4.017.543,00	2	4.126.780,00	2	4.268.906,00		
Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	3	4.300.000,00	3	90.820.500,00	3	92.667.698,00	3	95.019.604,00	3	97.603.187,00	3	100.960.737,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.300.000,00		90.820.500,00		92.667.698,00		95.019.604,00		97.603.187,00		100.960.737,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	3	4.300.000,00	3	90.820.500,00	3	92.667.698,00	3	95.019.604,00	3	97.603.187,00	3	100.960.737,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				225.117.000,00		196.673.750,00		200.674.710,00		205.767.834,00		211.362.661,00		218.641.982,00		
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	210	210	41.054.250,00	210	52.156.750,00	210	53.217.566,00	210	54.568.228,00	210	56.051.938,00	210	57.982.357,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				41.054.250,00		52.156.750,00		53.217.566,00		54.568.228,00		56.051.938,00		57.982.357,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	210	210	41.054.250,00	210	52.156.750,00	210	53.217.566,00	210	54.568.228,00	210	56.051.938,00	210	57.982.357,00		
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40	40	3.650.000,00	40	3.050.000,00	40	3.112.034,00	40	3.191.017,00	40	3.277.781,00	40	3.390.668,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.650.000,00		3.050.000,00		3.112.034,00		3.191.017,00		3.277.781,00		3.390.668,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40	40	3.650.000,00	40	3.050.000,00	40	3.112.034,00	40	3.191.017,00	40	3.277.781,00	40	3.390.668,00		
Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	141	141	107.118.750,00	141	141.467.000,00	141	144.345.110,00	141	148.008.589,00	141	152.032.942,00	141	157.268.957,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	615	615		615		615		615		615		615			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60	60		60		60		60		60		60			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				41.240.000,00		25.186.000,00		25.698.258,00		26.350.480,00		27.066.949,00		27.999.135,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60	60	41.240.000,00	60	25.186.000,00	60	25.698.258,00	60	26.350.480,00	60	27.066.949,00	60	27.999.135,00		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				32.054.000,00		28.701.000,00		29.284.750,00		30.027.997,00		30.844.458,00		31.906.741,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	141	141	32.054.000,00	141	28.701.000,00	141	29.284.750,00	141	30.027.997,00	141	30.844.458,00	141	31.906.741,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				107.118.750,00		87.580.000,00		89.362.102,00		91.630.112,00		94.121.535,00		97.363.081,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	615	615	107.118.750,00	615	87.580.000,00	615	89.362.102,00	615	91.630.112,00	615	94.121.535,00	615	97.363.081,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan)				823.449.030,00		831.592.600,00		848.506.362,00		870.043.741,00		893.694.740,00		924.476.526,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.926.286.085,00		2.036.669.747,00		2.078.093.573,00		2.130.840.163,00		2.188.766.728,00		2.264.152.137,00		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Ngupasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135	135	337.414.000,00	135	444.716.800,00	135	453.761.895,00	135	465.280.660,00	135	477.926.150,00	135	494.388.866,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				337.414.000,00		444.716.800,00		453.761.895,00		465.280.660,00		477.926.150,00		494.388.866,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135	135	337.414.000,00	135	444.716.800,00	135	453.761.895,00	135	465.280.660,00	135	477.926.150,00	135	494.388.866,00		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Ngupasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	13	486.035.030,00	13	386.875.800,00	13	394.744.467,00	13	404.763.081,00	13	415.768.590,00	13	430.087.660,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				486.035.030,00		386.875.800,00		394.744.467,00		404.763.081,00		415.768.590,00		430.087.660,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	13	486.035.030,00	13	386.875.800,00	13	394.744.467,00	13	404.763.081,00	13	415.768.590,00	13	430.087.660,00		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Gondomanan (Kelurahan Prawirodirjan)				1.048.274.607,00		1.168.009.699,00		1.191.765.848,00		1.222.015.153,00		1.255.236.256,00		1.298.469.531,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.926.286.085,00		2.036.669.747,00		2.078.093.573,00		2.130.840.163,00		2.188.766.728,00		2.264.152.137,00		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188	188	617.085.750,00	188	583.579.500,00	188	595.448.923,00	188	610.563.705,00	188	627.159.443,00	188	648.761.752,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				617.085.750,00		583.579.500,00		595.448.923,00		610.563.705,00		627.159.443,00		648.761.752,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188	188	617.085.750,00	188	583.579.500,00	188	595.448.923,00	188	610.563.705,00	188	627.159.443,00	188	648.761.752,00		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Prawirodirjan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	18	431.188.857,00	13	584.430.199,00	13	596.316.925,00	13	611.451.448,00	13	628.076.813,00	13	649.707.779,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				431.188.857,00		584.430.199,00		596.316.925,00		611.451.448,00		628.076.813,00		649.707.779,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	18	431.188.857,00	13	584.430.199,00	13	596.316.925,00	13	611.451.448,00	13	628.076.813,00	13	649.707.779,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143.375.000,00		135.270.000,00		138.021.302,00		141.524.540,00		145.371.975,00		150.377.918,00		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondomanan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100	100	143.375.000,00	100	135.270.000,00	100	138.021.302,00	100	141.524.540,00	100	145.371.975,00	100	150.377.918,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				143.375.000,00		135.270.000,00		138.021.302,00		141.524.540,00		145.371.975,00		150.377.918,00		
Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	143.375.000,00	12	135.270.000,00	12	138.021.302,00	12	141.524.540,00	12	145.371.975,00	12	150.377.918,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				143.375.000,00		135.270.000,00		138.021.302,00		141.524.540,00		145.371.975,00		150.377.918,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	143.375.000,00	12	135.270.000,00	12	138.021.302,00	12	141.524.540,00	12	145.371.975,00	12	150.377.918,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				74.005.000,00		70.625.000,00		72.061.466,00		73.890.520,00		75.899.281,00		78.512.903,00		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondomanan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100	100	74.005.000,00	100	70.625.000,00	100	72.061.466,00	100	73.890.520,00	100	75.899.281,00	100	78.512.903,00	7.01.4.01.2.22.10.0000 - Kemantren Gondomanan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				74.005.000,00		70.625.000,00		72.061.466,00		73.890.520,00		75.899.281,00		78.512.903,00		
Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	50	21.315.000,00	50	16.505.000,00	50	16.840.665,00	50	18.396.954,00	50	18.896.845,00	50	19.547.303,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				21.315.000,00		16.505.000,00		16.840.665,00		18.396.954,00		18.896.845,00		19.547.303,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	50	21.315.000,00	50	16.505.000,00	50	16.840.665,00	50	18.396.954,00	50	18.896.845,00	50	19.547.303,00		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			52.690.000,00	2	54.120.000,00	2	55.220.801,00	2	55.493.566,00	2	57.002.436,00	2	58.965.600,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				52.690.000,00		54.120.000,00		55.220.801,00		55.493.566,00		57.002.436,00		58.965.600,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	2	52.690.000,00	2	54.120.000,00	2	55.220.801,00	2	55.493.566,00	2	57.002.436,00	2	58.965.600,00		

4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana;
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian; dan
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda.

2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat;
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan.

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga;
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata;
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi;
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin;

b. Kampung Layak Huni; dan
c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan;

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
   a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan;
   b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat;
   c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan;
   d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan; dan
   e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah;
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan; dan
   c. Jogja Tangguh Bencana.

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4.3a Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan b. Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan 2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngupasan 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan 4) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Prawirodirjan 5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6) Evaluasi Kelurahan c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 5) Pelatihan Keluarga Tanggap bencana	
2	Pemajuan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : a. Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngupasan 2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Prawirodirjan b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Jogja Tangguh Bencana	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. IKU Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan	Poin	484.88	497.20	505.20	509.20	513.20	517.20	
1.1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Poin	369.6	385	395	400	405	410	
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	A (85,52 - 90,00) Nilai	

1) Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan

Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan merupakan indikator kinerja dari tujuan OPD yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gondomanan. Target diperoleh dari perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.

Evaluasi kinerja kemantren dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan berasaskan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan sinergisitas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kemantren. Sasaran Evaluasi Kinerja Kemantren meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan tahapan:

a. sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren;
b. pengisian data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren secara mandiri melalui aplikasi “SI KEREN”;
c. penilaian verifikasi data dukung oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
d. penyampaian presentasi data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Mantri Pamong Praja;
e. verifikasi dan klarifikasi lapangan data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
f. penyampaian hasil Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
g. penetapan Kemantren terbaik; dan
h. pengumuman Kemantren terbaik.

Penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren dilakukan dengan indikator penilaian yang meliputi aspek:
a. penyelenggaraan atributif;
b. penyelenggaraan tugas delegatif;
c. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum;
d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
e. tata kelola pemerintahan; dan/atau
f. inovasi, prestasi dan penghargaan.

1.1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan. Target diperoleh dari perhitungan Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Nilai evaluasi perkembangan pembangunan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mengetahui tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan

a. Pemerintahan Kelurahan;

b. Kinerja;

c. Inisiatif dan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat;

d. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government; dan

e. Pelestarian adat dan budaya.

2) Bidang Kewilayahan

a. Identitas desa dan kelurahan;

b. Batas;

c. Inovasi;

d. Tanggap dan siaga bencana; dan

e. Pengaturan investasi.

3) Bidang Kemasyarakatan

a. Partisipasi masyarakat;

b. Lembaga Kemasyarakatan;

c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);

d. Keamanan dan ketertiban;

e. Pendidikan;

f. Kesehatan;

g. Ekonomi;

h. Penanggulangan kemiskinan; dan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan

Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Gondomanan yang Baik dan Adaptif. Target diperoleh dari perhitungan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan arah

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) parameter penilaian yaitu :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
4) Indeks Kepuasan Masyarakat
5) Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP
6) Indeks Profesionalitas (IP) ASN
7) Penilaian Pengawasan Arsip Internal
8) Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

Perangkat Daerah/ Unit Kerja leading sector melaksanakan penilaian terhadap parameter yang telah ditetapkan berdasar Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya. Mekanisme yang digunakan oleh Perangkat Daerah leading sector dalam melaksanakan masing-masing parameter penilaian mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian dari Perangkat Daerah leading sector disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir Oktober. Evaluator internal menyusun Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah kepada Wali Kota Yogyakarta dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta paling lambat bulan November.

Evaluator internal melakukan pembobotan atas hasil penilaian pada 8 (delapan) parameter. Hasil pembobotan menjadi nilai RB level Perangkat Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel 4.5. Kategori dan Predikat Nilai Reformasi Birokrasi

No.	Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 - 100	AA	Istimewa
2.	>80 - 90	A	Sangat Baik
3.	>70 - 80	BB	Baik
4.	>60 - 70	B	Cukup Baik
5.	>50 - 60	CC	Cukup
6.	>30 - 50	C	Buruk
7.	>0 - 30	D	Sangat Buruk

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Gondomanan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kemantren Gondomanan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para stakeholder pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Gondomanan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Gondomanan.

RENCANA STRATEGIS

KEMANTREN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemantren Pakualaman dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai suatu rencana strategis yang menjadi pedoman Kemantren Pakualaman dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan visi dan misi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Renstra yang tersusun berisikan tentang permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan terkait kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rencana Strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini dibuat, semoga dapat menjadi acuan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban.

Yogyakarta,15 September 2025

Mantri Pamong Praja
Kemantren Pakualaman

Saptohadi, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197001271990031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PD **6**
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 22
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan 23
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 25
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.2.2. Identifikasi Isu-isu Strategis 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **38**
3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 38
3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 38
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 42
3.3.1. Penahapan Pembangunan 44
3.3.2. Lokus Renstra Perangkat Daerah 46
3.3.3. Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 47
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 48

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **51**
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 51
4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 71
4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 89
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 92

BAB V PENUTUP 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 11
Tabel 2.2 Data ASN di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 11
Tabel 2.3 Data ASN di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.4 Daftar Inventaris Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Tahun 2020-2025 14
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (Indikator Program) Tahun 2020-2025 15
Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan 26
Tabel 2.8 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 37
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 41
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 43
Tabel 3.3 Tahapan Renstra Perangkat Daerah 46
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 49
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 56
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 72
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 90
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kemantren 9
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Kelurahan 10
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 39
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebuah dokumen perencanaan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah selama periode tertentu. RPJMD merinci visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah yang harus dicapai dalam jangka menengah. Dokumen RPJMD memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui RPJMD, suatu dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta mengukur progres yang telah dicapai selama periode tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra PD) yang berpedoman pada RPJMD. Renstra PD disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, serta sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, program, serta indikator kinerja yang ingin dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah, termasuk tantangan-tantangan baru, perubahan iklim, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kota tentang RPJMD Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik. Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan kata lain Renstra PD harus mencerminkan dan mendukung arah strategis RPJMD, serta disusun secara kolaboratif, sistematis, dan diawasi secara internal melalui mekanisme reviu.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

22. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dari aspek unsur urusan kewilayahan yang diampu oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya;
7. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren dalam kedudukan dan fungsinya memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban, serta mengembangkan potensi. Untuk itu perlu mewujudkan Kemantren yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja.

Dalam Pasal 4 (empat) Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan dijelaskan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, Kemantren mempunyai fungsi yang tertera pada Pasal 5 (lima) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali kota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Mantri Pamong Praja adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kemantren yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yoyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali kota kepada Mantri Pamong Praja, urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi:

a. urusan pemerintahan umum
b. urusan pendidikan
c. urusan kesehatan
d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. urusan sosial
g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
h. urusan pertanahan
i. urusan lingkungan hidup
j. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
k. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
l. urusan perhubungan
m. urusan kebudayaan
n. urusan perpustakaan

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 terdiri atas:

a. Mantri Pamong Praja;
b. Mantri Anom, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Umum; dan
h. Kelompok jabatan fungsional; dan
i. Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:

Bagan 2.1 Susunan Organisasi Kemantren

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN KELURAHAN.

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN

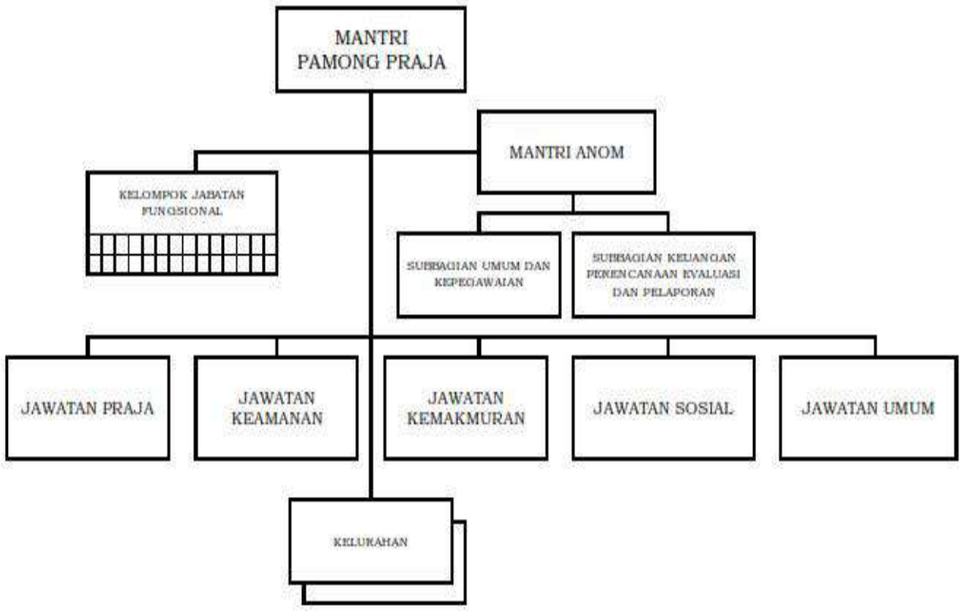

Struktur Organisasi Kelurahan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kemantren berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 terdiri atas:

a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelurahan mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:

Bagan 2.2 Susunan Organisasi Kelurahan

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN KELURAHAN.

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

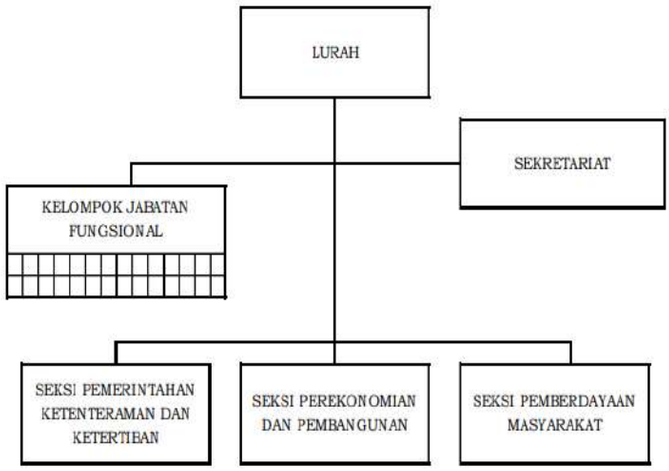

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, maupun teknologi. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi faktor kunci untuk mencapai efetivitas pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sumber Daya Manusia

Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kuantitas dan kualitas yang terbatas seringkali menjadi kendala dan tantangan dalam mencapai tujuan organisasi. Terlebih lagi ketersediaan SDM yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat Kemantren maupun Kelurahan baik dari segi kemampuan maupun motivasi kerja SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yang mempunyai 2 (dua) kelurahan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai, terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK, 8 (delapan) orang Tenaga Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan 4 (empat) orang Tenaga Outsourcing Kebersihan. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2	Mantri Anom	-	1	-	-	1	-	1
3	Kepala Jawatan	3	2	-	-	3	2	5
4	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1	-	1
5	Lurah	1	1	-	-	1	1	2
6	Sekretaris Lurah	-	2	-	-	2	-	2
7	Kepala Seksi Kelurahan	2	3	-	-	5	-	5
8	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	-	-	2	-	2
9	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	-	-	4	-	4
10	Pengolah Data dan Informasi	-	2	-	2	-	-	2
11	Arsiparis Pelaksana/Terampil	-	1	-	-	-	-	1
12	Penata Pelayanan Operasional	1	-	-	-	-	-	1
13	Tenaga Jasa Lainnya Orang Perseorangan	5	3	-	-	-	-	8
14	Tenaga Outsourcing Kebersihan	3	1	-	-	-	-	4
Jumlah		**19**	**20**					**39**

(Sumber Data: SIM Kepegawaian dan SIM TT)

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaiman tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Data ASN di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	1	1
2	Diklatpim IV	11	5	6
3	Struktural yang belum diklat penjenjangan	4	1	3

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan dari pegawai antara lain, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data ASN di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SMP	-	-	-

SMA/Sederajat	1	-	1
D-III	-	6	6
D-IV	1	-	1
S1	6	7	13
S2	3	3	6

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka di Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti telah dilengkapi dengan gedung kantor dan sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4

Daftar Inventaris Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Alat Besar	11 unit	Baik
2	Alat Angkutan	24 unit	Baik
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6 unit	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	574 unit	Baik
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	39 unit	Baik
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3 unit	Baik
7	Alat Laboratorium	7 unit	Baik
8	Komputer	164 unit	Baik
9	Alat Keselamatan Kerja	1 unit	Baik
10	Rambu-rambu	61 unit	Baik
11	Peralatan Olahraga	5 unit	Baik
12	Bangunan Gedung	29 unit	Baik
13	Monumen	6 unit	Baik
14	Jalan dan Jembatan	11 unit	Baik
15	Bangunan Air	7 unit	Baik
16	Instalasi	14 unit	Baik
17	Bahan Perpustakaan	22 unit	Baik
18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1 unit	Baik
19	Aset Tidak Berwujud	1 unit	Baik

(Sumber Data: Rekapitulasi Laporan Intrakom Kemantren Pakualaman per 30 Juni 2025)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi

pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan yang memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan peemrintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan Pembangunan, kesejahteraan Masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Guna mendukung urusan tersebut maka ditetapkan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta adalah meningkatnya tingkat perkembangan dan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator kinerja sasaran, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman.

Untuk mendukung tercapainya mencapai sasaran strategis tersebut di atas maka disusunlah 5 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kelima program tersebut memiliki sasaran program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD (Mantri Pamong Praja). Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama/Sasaran) Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	342 poin	370 poin	384,5 poin	407 poin	407 poin	407 poin	349 poin	371,50 poin	399 poin	407 poin	407 poin	407,5 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	A nilai	A nilai	A nilai	-	-	-	A nilai	A nilai	*Belum ada*

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja (Indikator Program) Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)											
				2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d TW II
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	342 poin	349 poin	370 poin	371,50 poin	384,5 poin	399 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407,5 poin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	81,49 poin	81,53 poin	81,59 poin	81,60 poin	81,69 poin	81,72 poin	82,00 poin	85,14 poin	83,00 poin	88,33 poin	84,00 poin	89,218 poin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	629.387.000 Rupiah	545.401.750 Rupiah	632.535.000 Rupiah	1.014.273.000 Rupiah	635.697.000 Rupiah	891.703.300 Rupiah	705.000.000 Rupiah	1.166.815.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	974.015.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	591.175.000 Rupiah
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	-	-	96 pelanggaran	94 pelanggaran	84 pelanggaran	82 pelanggaran	80 pelanggaran	80 pelanggaran	79 pelanggaran	79 pelanggaran	78 pelanggaran	38 pelanggaran

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)											
				2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d TW II
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	*Belum ada*
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	*Belum ada*

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada awal tahun 2020 dalam Renstra Tahun 2017-2022 memiliki satu Program Kegiatan, yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman dan memiliki 2 (dua) indikator program, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat. Kemudian pada tahun 2020 terdapat reviu indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada tahun 2021 dilakukan reviu Renstra, yaitu reviu indikator program berdasarkan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman menjadi 3 (tiga) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan indikator program bertambah 1 (satu), yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga terdapat 3 (tiga) sasaran program, yaitu sasaran program Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, sasaran program Pelanggaran Perda di Kemantren Pakualaman menurun dengan indikator program Jumlah Pelanggaran Perda menurun, dan sasaran program Swadaya Masyarakat Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator program Angka Swadaya Murni.

Berdasarkan tabel penyandingan di atas capaian periode Renstra Tahun 2017-2022 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dan indikator program sampai dengan tahun 2022 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan.

Sementara untuk capaian tahun 2023 sampai dengan capaian Triwulan II tahun 2025 merupakan capaian periode Renstra Tahun 2023-2026. Dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Pakualaman terdapat perubahan. Di periode Renstra Tahun 2017-2022 hanya ada 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat dengan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 1, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat. Sementara di periode Renstra Tahun 2023-2026 ada 2 (dua) IKU dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 5, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, dan Misi 6, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum.

Adapun dari tabel 2.5 dan 2.6 diketahui berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja OPD maupun pelaksanaan kinerja program, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Indikator Kinerja OPD "Nilai evaluasi perkembangan Kemantren Pakualaman" faktor pendorongnya, yaitu:
    1. Penentuan sasaran dan target yang tepat dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
    2. Penentuan indikator kinerja yang tepat terhadap sasaran dan target;
    3. Semangat pegawai Kemantren dan Kelurahan untuk tetap berkegiatan dan berinovasi;
    4. Kerja sama yang baik antara Kemantren, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan Forkompintren (Polsek, Koramil, KUA, dan Puskesmas) dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah;
    5. Sinergitas yang baik antara Kemantren dan Kelurahan dengan lembaga sosial kemasyarakatan di wilayah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yang didukung potensi dan juga perencanaan;
    6. Warga yang aktif berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan dimulai dari Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Serta, optimalisasi potensi yang ada di masyarakat;

    Sedangkan faktor penghambat capaian indikator kinerja OPD ini, yaitu:
    1. Kegiatan sudah terlaksana tetapi masih kurang dalam pendokumentasian kegiatan tersebut. Pendokumentasian belum terhimpun pada satu file sehingga masih kesulitan dalam melengkapi bukti dukung;
    2. Penilaian mandiri dilakukan setahun sekali sehingga nilai yang ada berlaku untuk satu tahun;
    3. Setiap kelurahan terdapat nilai lebih dan nilai kurangnya masing-masing pada instrument penilaian.

b. Untuk Indikator Kinerja OPD "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat" faktor pendorongnya, yaitu:
    1. Penentuan sasaran dan target yang tepat dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
    2. Penentuan indikator kinerja yang tepat terhadap sasaran dan target;
    3. Kerja sama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi rutin (Rakortas) setiap hari Senin dan menampilkan data yang terintegrasi berbasis linktr.ee sehingga bisa dilakukan pemantauan informasi, serta *update* data dari manapun dan kapanpun;

4. Semangat pegawai Kemantren dan Kelurahan untuk tetap berkegiatan dan berinovasi;
5. Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam penilaian kedisiplinan untuk pegawai se-Kemantren Pakualaman. Kriteria penilaiannya adalah:
    - Ketepatan waktu masuk kerja;
    - Kehadiran apel pagi setiap hari Senin
    - Berseragam dan kelengkapan pemakaian atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Koordinasi intens dengan OPD Teknis di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan faktor penghambat capaian indikator kinerja OPD ini, yaitu:

1. Masih adanya ASN yang belum memenuhi syarat Indeks Profesionalitas ASN;
2. Terdapat kendala dalam pembelian belanja modal atas produk ber-TKDN;
3. Terdapat kendala dalam penyusunan dokumen oleh pihak ketiga sehingga menyebabkan realisasi tidak sesuai tata kala kegiatan;
4. Pendokumentasian data dukung masih kurang optimal.

c. Untuk Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman", faktor pendukungnya, yaitu:
    1. Survey Kepuasan Masyarakat terintegrasi di website Kemantren Pakualaman;
    2. Pelaksanaan SKM dilaksanakan secara survey manual dan survey digital. Survey manual menggunakan kuesioner manual, sedangkan survey digital menggunakan QR Code, link di website Kemantren Pakualaman dan salinan link google form yang tersebar melalui *whatsapp*. Kuesioner disebarkan kepada pengguna layanan dan unsur pengurus lembaga sosial masyarakat sebagai pengguna layanan;
    3. SDM/pegawai menguasai layanan, hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan dari petugas terkait pengguna *handphone* layanan yang masih gagap teknologi/tidak membawa *handphone*;
    4. Kemantren Pakualaman sudah memiliki genset, sehingga pelyanan tidak terganggu jika terjadi pemadaman.

    Walaupun target dapat tercapai, bahkan melebihi target, masih terdapat faktor yang menghambat proses pencapaian target, diantaranya:

    1. Kenyamanan lingkungan berkaitan dengan parkir motor dan mobil merupakan angka yang paling kecil meskipun sudah ada petugas linmas yang berjaga.

d. Untuk Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan “Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman”, faktor pendorongnya, yaitu:
    1. Adanya sinergisitas yang bagus antara stakeholder sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun wilayah;
    2. Meningkatnya empati masyarakat untuk berbagi kepada sesama;
    3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya tradisi;
    4. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pembangunan di wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah;
    5. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik secara swadaya meningkat sebagai dampak darurat sampah di Kota Yogyakarta;
    6. Adanya kegiatan jimpitan pos ronda dan kegiatan PKK.

    Adapun faktor penghambat dari capaian program ini, yaitu:
    1. Adanya sebagian warga masyarakat yang belum memahami bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja;
    2. Masih adanya rasa ketidakpercayaan sebagian kelompok masyarakat terhadap pengurus lembaga yang ada di wilayah akan ditindak lanjuti dengan reformasi kelembagaan di wilayah;
    3. Tidak ada donatur tetap dari tokoh masyarakat, sifatnya hanya insidentil;
    4. Tidak bisa dipastikan waktu kejadiannya.

e. Untuk Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum “Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman”, faktor pendorongnya, yaitu:
    1. Tersedianya Personel BKO dan Mobil Operasional BKO membantu kegiatan sambang wilayah dan operasi penegakan Perda;
    2. Adanya edukasi ke warga dari instansi untuk perizinan PBG dengan sambang wilayah mendorong warga masyarakat untuk semakin menyadari pentingnya perizinan;
    3. Adanya sosialisasi kepada Ketua RT dan Ketua RW, Tokoh Masyarakat di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tentang pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta khususnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
    4. Pembinaan dengan keliling dan sambang pemantauan pondokan dan PKL;
    5. Kolaborasi pengawasan terpadu Forkompintren.

    Capaian jumlah Pelanggaran Perda yang sama dengan target menandakan warga masyarakat sudah mulai sadar dan mentaati peraturan yang ada. Namun, demikian masih terdapat beberapa penghambat yang membuat capaian belum maksimal, diantaranya:

1. Masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Peraturan Daerah, yaitu izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Perundangan lainnya;
2. Warga masih kesulitan mengurus/mengakses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara *online*.

f. Untuk Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum "Presentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi", faktor pendorongnya, yaitu:
   1. Mengintensifkan sambang dan patroli wilayah antara BKO, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas;
   2. Sudah ada sinkronisasi sasaran antara Bhaninkamtibmas dan Babinsa;
   3. Adanya koordinasi terkait persiapan Pemilukada Tahun 2024;
   4. Adanya koordinasi terkait dengan penanganan dan penertiban APK Pemilukada Tahun 2024;
   5. Pengamanan Nataru dengan menyiagakan Linmas, posko, dan patrol wilayah hingga pergantian tahun.

   Faktor penghambat yang ada di wilayah terkait dengan capaian indikator ini adalah:
   1. Sudah ada edukasi terkait perizinan PBG, PKL, Pondokan tetapi kesadaran masyarakat masih kurang dalam mematuhi aturan.

g. Untuk Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman", faktor pendorongnya, yaitu:
   1. Sudah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat yang juga tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengirimkan/mengupload data dukung;
   2. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

   Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam capaian dari indikator ini adalah:
   1. Masih terdapat beberapa catatan dari Inspektorat yang perlu diperhatikan, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya terdokumentasikan, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya memengaruhi capaian akuntabilitas kinerja.

Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Hasil dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ke depan, diantaranya:

1. Masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Peraturan Daerah, yaitu izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Perundangan lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengolah dan mengelola sampah di rumah tangga masing-masing sebelum dibuang;
3. Meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan kewilayahan;
4. Meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menanganganani kasus stunting, kemiskinan.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu ke depan adalah sebagai berikut:

1. Letak Kemantren Pakualaman yang berdampingan dengan Puro Pakualaman menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki Kemantren lain dimana Puro Pakualaman beberapa kali turut membantu mensukseskan program kegiatan Kemantren;
2. Peningkatan intensitas Rapat Koordinasi (Rakortas) di level Kemantren Pakualaman dan pendokumentasian rapat;
3. Meningkatkan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan semua PPTK dan petugas urusan kegiatan;
4. Mengusulkan ASN Kemantren Pakualaman mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop untuk peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
5. Menerbitkan SK Tugas Tambahan dan SK Pelaksana Tugas terhadap personil yang ada untuk menutup kekurangan personil agar kegiatan dapat tetap berjalan sembari menunggu adanya pengangkatan maupun mutasi pegawai yang masuk ke Kemantren Pakualaman;
6. Kolaborasi pengawasan terpadu Forkompintren;
7. Adanya sinergisitas yang bagus antara stakeholder sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun wilayah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kemantren merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berbagai kelompok masyarakat di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif dan

inklusif. Adapun kelompok sasaran layanan utama Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta meliputi:

1. Masyarakat Umum, yaitu warga yang tinggal di wilayah kemantren, termasuk kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu, perempuan, dan anak-anak;
2. Pelaku Usaha dan UMKM, yaitu para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk kewirausahaan, akses permodalan, digitalisasi usaha, dan fasilitasi perizinan;
3. Kaum Muda dan Pendidikan, yaitu siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
4. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat, yaitu pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayana publik;
5. Kelompok Keagamaan dan Adat, yaitu tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

Melalui pendekatan berbasis kelompok sasaran, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan publik yang tepat guna dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masing-masing kelompok sasaran akan menjadi landasan dalam menyusun program, kegiatan, serta inovasi pelayanan yang mendukung terwujudnya Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yang sejahtera, tertib, sehat, dan inklusif.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan adalah instansi, lembaga, organisasi yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagai bagaian dari Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kemantren dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Mitra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan layanan kependudukan terkait pembuatan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Kematian, Kartu Kelahiran, e-KTP, serta pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui program jemput bola di wilayah;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan perizinan usaha maupun non usaha dalam layanan *Online Single Submission* (OSS). Selain itu DPMPTSP juga menjadi salah satu narasumber terkait pengajuan izin PBG maupun pondokan ketika diadakan sosialisasi di kemantren;

3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penyebarluasan informasi publik dan sebagai induk program satu data Kota Yogyakarta;
4. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan pasar murah di kemantren;
5. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi dengan pemberdayaan forum umkm kemantren dan kegiatan *bazaar* di kemantren;
6. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sektor ekonomi dan ketahanan pangan melalui kegiatan pertanian kota di wilayah kemantren, pelatihan olahan pangan selain dari beras, serta pemanfaatan lahan di kemantren sebagai tempat pertanian, perikanan skala kecil;
7. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Pariwisata melalui kegiatan kampung wisata, pokdarwis, dan WJNC;
8. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Budaya melalui kegiatan kampung menari, RKB, dan kegiatan pelestarian budaya lainnya;
9. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan Sektor Sosial, seperti pemutakhiran penduduk penerima bantuan sosial, pemberian bantuan sosial;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan persampahan dan lingkungan. Selain itu, DLH juga menjadi mitra di wilayah dengan menyediakan satu kendaraan sebagai *mobile depo* yang mengangkut sampai dari penggerobak, sehingga sampah yang dikumpulkan penggerobak dan sudah terpilah tidak lagi dibuang ke depo tetapi langsung diambil oleh DLH Kota Yogyakarta;
11. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Pakualaman Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan kesehatan, seperti cek kesehatan gratis bagi lansia, pemberian PMT untuk pencegahan stunting, posbindu lansia, dan posyandu lansia;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan penanganan stunting, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan mewujudkan keluarga yang berkualitas;
13. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sarana prasarana di kemantren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti pemeliharaan talud sepanjang Sungai Code, pemeliharaan PJU, pemeliharaan jalan;
14. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan berkaitan dengan kepemudaan, serta kegiatan jam belajar tambahan di masyarakat;

15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan antisipasi kebencanaan melalui pelatihan atau simulasi penanganan kebakaran dengan media kompor gas dan APAR;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan perencanaan pada musrenbang kemantren dan kelurahan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui Desk Timbal Balik tiap Triwulan;
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan penganggaran, evaluasi, dan pelaporan keuangan;
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan antisipasi kebencanaan melalui pelatihan atau simulasi penanganan bencana alam dan banjir, peningkatan kapasitas KTB, penyediaan alat dan prasarana evakuasi dan kedaruratan;
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan kerukunan antar umat beragama, pembauran kebangsaan, sinau Pancasila, dan deteksi dini kerawanan sosial masyarakat;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam dukungan kegiatan sambang kampung, patroli Penegakan Perda, serta sambang pondokan dan pelaku usaha;
21. Polsek Pakualaman dalam dukungan kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban melalui sambang kampung, patroli Penegakan Perda;
22. Koramil Pakualaman dalam dukungan kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban melalui sambang kampung, patroli Penegakan Perda;
23. KUA Pakualaman dalam dukungan kegiatan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan kerukunan antar umat beragama, pengajian rutin tiap bulan, pembauran kebangsaan;
24. 1O1 Style Yogyakarta Malioboro dalam dukungan peningkatan ekonomi lokal dan pengembangan wisata;
25. Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta dalam dukungan peningkatan ekonomi lokal dan pengembangan wisata.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk rincian tugas Kemantren didasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Kemantren merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali kota. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota, berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali kota kepada Mantri Pamong Praja masih ada yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi termasuk sarana prasarana, dana, dan personil (terlalu banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis yang tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya);
2. Belum optimalnya penataan SDM Aparatur dan masih terdapat rangkap jabatan, khusus berkaitan dengan pengelolaan keuangan, barang, dll dikarenakan keterbatasan personil yang ada;
3. Belum optimalnya Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
4. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
5. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Tabel 2.7

Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Memengaruhi	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat	1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab	UU ASN, Perwal Anjab	1. Terbatasnya penerimaan ASN 2. Terbatasnya ASN yang mengikuti diklat	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Keamanan dan Ketertiban	1. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik disengaja atau tidak 2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami alur proses perizinan PBG terbaru 3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan	1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Reklame 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib dan tidak melanggar peraturan 2. Masyarakat “gaptek” terkait sistem perizinan PBG	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena tidak ada kewenangan yustisi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Memengaruhi	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
		6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pondokan 7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung		
Umum	1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi ketentuan 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memenuhi	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan
Kemakmuran	1. Pemeliharaan sarana prasarana di wilayah 2. Angka kemiskinan	Perwal pelimpahan kewenangan	1. Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak 2. Kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan	Keterbatasan kewenangan Kemantren dan anggaran
Praja	Peran RT RW dalam pengurusan administrasi kependudukan yang semakin berkurang		RT RW sebagai salah satu ujung tombak dalam pengawasan lingkungan	Keterbatasan kewenangan Kemantren dan anggaran
Sosial	1. Masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah	Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	Masyarakat tidak menyampaikan data dan laporan kepada kelurahan	Keterlambatan laporan pertanggung jawaban dari masyarakat

Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun ke depan.

2.2.2. Identifikasi Isu-isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu Strategis yang dihadapi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Kemantren merupakan OPD yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kemantren Kota Yogyakarta kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat maka dikeluarkanlah Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN). Untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pada tanggal 12 Desember 2012 seluruh Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta diresmikan sebagai Kecamatan PATEN. Dan mulai tanggal 3 Januari 2021 dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Kecamatan PATEN berubah menjadi Kemantren PATEN.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Kemantren sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Subtantif, Kemantren telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
b. Administratif, Kemantren telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Nomor: 132/PA/2024 dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Nomor: 123/PA/2024 sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan;
c. Teknis, adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yaitu dengan ruangan yang representatif, nyaman, aman, pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kemantren maupun dari tenaga teknis pelayanan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa langkah sudah dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta antara lain:

a. Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur)

   Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta berkaitan Tugas Pokok Fungsi Kemantren tahun ini, yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan; dan Peraturan Wali

Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, maka di tahun 2024 telah dilakukan penyusunan SPP (Standar Pelayanan Publik) dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Kota Yogyakarta Nomor: 123/PA/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dan telah dilakukan penyusunan SOP dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Kota Yogyakarta Nomor: 132/PA/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

b. Melengkapi Gedung-gedung Kantor di Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti dengan Sarana Pendukung Kelancaran Pelayanan

Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti telah dilengkapi gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak) di tahun 2024 ini antara lain Ruang Laktasi di Ruang Pelayanan Kemantren Pakualaman, Alat Peraga Edukasi Anak (APE) di Kemantren Pakualaman dan di Kelurahan Purwokinanti, tempat duduk anak di Ruang Pelayanan Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti sebagai upaya pelayanan yang ramah anak. Untuk mendukung pelayanan pada difabel dan lansia di Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti dilengkapi dengan kursi roda. Terdapat PC Unit di Kemantren Pakualaman, Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti sebagai sarpras pelayanan administrasi, dilengkapi kipas angin dan *mic wireless clip on* untuk penunjang kegiatan masyarakat di Pendopo Kemantren Pakualaman. Terdapat genset di Kemantren Pakualaman sebagai solusi ketika listrik padam, sehingga pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber-AC, tersedia TV, surat kabar, terpasangnya sekat akrilik dan tiang pembatas antrian, CCTV dan makanan-minuman kecil untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

c. Mereview Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berusaha menaikan target SKM dari tahun ke tahun

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM

bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Di tahun 2024 ini Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara digital sehingga efisiensi anggaran alat tulis kantor dalam pelaksanaan survey.

d. Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta menyadari bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berusaha mewujudkan kondisi yang menunjang Budaya Pelayanan Prima dengan meningkatkan fasilitas pelayanan berupa ruang pelayanan yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Upaya lain yang dapat mewujudkan pelayanan lebih kepada masyarakat adalah menyediakan makanan kecil serta minuman bagi warga masyarakat yang berkunjung ke ruang pelayanan termasuk sebagai pengguna pelayanan, pelayanan di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dilengkapi X-Banner sebagai informasi yang dapat dibaca secara terbuka oleh masyarakat berkaitan jenis layanan dan sebagainya.

e. Memberikan Pelayanan yang Sesuai dengan Perkembangan Teknologi dan Perkembangan Zaman

Perkembangan teknologi dan jaman menuntut adanya pembaharuan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan layanan informasi. Pengelolaan *hotline* untuk mempermudah masyarakat Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi *whatsapp*, berbagai media sosial seperti *website*, *instagram*, dan *facebook* Kemantren Pakualaman. Selain hal *hotline*, pelayanan di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta juga membuka layanan bagi masyarakat untuk pendaftaran JSS (*Jogja Smart Service*), pendaftaran perizinan OSS secara online seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Inovasi Daerah dari Kemantren Pakualaman BANTU PERI IUMK OSS (Membantu Perizinan IUMK Melalui website OSS), membantu pendampingan pelayanan merubah Kartu Keluarga (KK) pendaftaran cetak E-KTP, dengan Inovasi Daerah dari Kemantren Pakualaman PENDAK KELI DIPAKU (Pendampingan Dapat Kartu Keluarga Lengkap Online Di Kemantren Pakualaman) pendampingan mendaftar Akta Kelahiran dan Akta Kematian print Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dll, serta menyediakan fasilitas *playground* di ruang tunggu pelayanan, ruang khusus merokok dan ruang ASI untuk ibu yang akan menyusui anaknya.

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta menyadari bahwa salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta adalah pelayanan di Kemantren, oleh karenanya Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan upaya tersebut di atas.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu telah diatur dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Kota Yogyakarta Nomor: 132/PA/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Kemantren Pakualaman Tahun 2024, lampiran nomor 24 tentang SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Yang Datang Langsung dan lampiran nomor 25 tentang SOP Pelayanan Pemberian Informasi Publik Yang Tidak Datang Langsung yang di dalamnya terdapat SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Yang Datang Langsung, SOP Pelayanan Pemberian Informasi Publik Yang Tidak Datang Langsung, dan SOP Pengajuan keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 37/KEP/KOMINFOSAN/VI/2024 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat dapat diakses oleh Publik seperti Informasi yang lain.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya melibatkan masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan OPD Kemantren diawali atau dimulai dari proses Musyawarah

Pembangunan tingkat kampung dan tingkat kelurahan yang jelas telah melibatkan beberapa unsur dalam masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbang Kelurahan) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren (Musrenbang Kemantren).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kemantren bersifat fisik dan non fisik. Pemberdayaan Masyarakat Kemantren bersifat fisik antara lain kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Gunungketur tahun 2024, obyek yang disasar antara lain: Pengadaan CCTV kampung, pekerjaan *paving block*, pekerjaan gapura, pemeliharaan cermin tikungan, dan pelatihan pengolahan sampah organik (pemasangan biopori) yang termasuk ke dalam Dana Keistimewaan. Sedangkan Pembangunan Wilayah Kelurahan Purwokinanti tahun 2024, obyek yang disasar antara lain: pekerjaan *paving block*, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, pemeliharaan SAH, pemeliharaan taman, pengadaan cermin tikungan, pengadaan CCTV kampung, dan pelatihan pengolahan sampah organik (pemasangan biopori) yang termasuk ke dalam Dana Keistimewaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat Kemantren Pakualaman, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti. Kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dan sebagainya. Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersifat non fisik adalah untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan *zero stunting* dan pengelolaan sampah di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

4. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada pembangunan fisik harus mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja. Pembangunan kewilayahan berupa kegiatan fisik selain memperhatikan kebutuhan dan usulan warga masyarakat, harus memperhatikan juga kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, serta kemampuan pagu anggaran atau pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak semua usulan kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta. Proses pembangunan kewilayahan dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan peran serta warga masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya dengan skala prioritas dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Kemantren bersifat fisik antara lain kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Gunungketur tahun 2024, obyek yang disasar antara lain: Pengadaan CCTV kampung, pekerjaan *paving block*, pekerjaan gapura, pemeliharaan cermin tikungan, dan pelatihan pengolahan sampah organik (pemasangan biopori) yang termasuk ke dalam Dana Keistimewaan. Sedangkan Pembangunan Wilayah Kelurahan Purwokinanti tahun 2024, obyek yang disasar antara lain: pekerjaan *paving block*, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, pemeliharaan SAH, pemeliharaan taman, pengadaan cermin tikungan, pengadaan CCTV kampung, dan pelatihan pengolahan sampah organik (pamasangan biopori) yang termasuk ke dalam Dana Keistimewaan.

5. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali kota.

6. Siaga Bencana Banjir Lahar Dingin Sungai di Wilayah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Sebagian wilayah di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta terutama di bantaran Sungai Code pernah beberapa kali terkena dampak banjir lahar dingin. Banjir karena hujan pun pernah melanda beberapa titik di bantaran Sungai Code di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Kemantren terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dengan penguatan Kampung Tangguh Bencana (KTB) di Kampung Jagalan Beji dan Kampung Jagalan Ledoksari.

Di wilayah Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman di sisi timur dilewati Sungai Manunggal di Kampung Gunungketur RW 03. Disaat musim hujan menjadi kebutuhan mendesak karena adanya kerusakan talud

sisi barat sungai yang dikhawatirkan longsor, sehingga perlu perbaikan dari instansi terkait. Untuk mitigasi bencana di Kampung Gunungketur telah terbentuk KTB Gunungketur.

Dalam Penanganan Bencana Alam di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Mantri Pamong Praja Nomor: 132/PA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta lampiran Nomor 48.

7. Siaga Bencana Kebakaran

Kemantren Pakualaman yang berada di tengah Kota Yogyakarta, dengan padatnya pemukiman penduduk mempunyai resiko bencana kebakaran, sehingga seluruh kampung yang ada di Kelurahan Gunungketur, yaitu Kampung Gunungketur, Kampung Kauman dan Kampung Margoyasan serta seluruh kampung yang ada di Kelurahan Purwokinanti, yaitu Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Purwokinanti dan Kampung Kepatihan melalui Kampung Tangguh Bencana (KTB) masing-masing telah diadakan sosialisasi dan pelatihan penanganan bencana kebakaran. Untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kebakaran di wilayah permukiman Kemantren Pakualaman telah dibentuk kelompok relawan kebakaran di kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti yang bertugas menghubungkan dengan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Dalam Penanganan Bencana Kebakaran di Masyarakat Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Mantri Pamong Praja Nomor: 132/PA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta lampiran Nomor 48.

8. Pengelolaan Sampah

Semenjak ditutupnya TPS Piyungan permasalahan sampah di Kota Yogayakarta menjadi perbincangan dan perhatian publik. Masyarakat yang sebelumnya mudah dalam membuang sampah di depo saat ini harus dibatasi waktu dan jumlahnya karena jumlah sampah di depo yang telah melebihi kapasitas. Oleh karena itu masyarakat di minta untuk melakukan pemilahan sampah organik dan an organik. Penumpukan sampah organik yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dalam pengelolaan sampah organik agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah organik adalah metode biopori, losida dan ember tumpuk/komposter. Sampah organik yang diolah dengan metode-metode tersebut nantinya ditempatkan dalam lubang biopori/losida/ember tumpuk/komposter yang kemudian akan diuraikan oleh mikroorganisme. Hasil dari metode tersebut nantinya akan menjadi pupuk kompos yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik sebagai bagian dari pengembangan lumbung mataraman. Konsep lumbung

mataraman ini adalah mendorong masyarakat untuk menghasilkan dan memanfaatkan hasil pertanian secara mandiri, termasuk didalamnya penggunaan pupuk organik dari sisa bahan makanan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Sedangkan sampah an organik yang dihasilkan harapannya dapat diserap oleh bank sampah yang ada di masing-masing wilayah sebagai salah satu langkah untuk mengingkatkan nilai ekonomis dari sampah. Kemudian barulah sampah yang sudah benar-benar tidak bisa diolah seperti residu maupun B3 yang dibuang oleh masyarakat ke depo. Sehingga diharapkan sampah yang dibuang di dpo sudah terpilah dan jumlahnya lebih sedikit dari yang ada saat ini.

Pada tahun 2024 di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sudah digalakkan pembuatan biopori sampah yang pendanaannya bersumber pada Dana Keistimewaan DIY. Kemudian di tahun 2025 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta menjadi *Pilot Project* pengelolaan sampah berbasis Rumah Tangga. Melalui program tersebut setiap rumah tangga diwajibkan untuk memilah sampah menjadi beberapa kategori, yaitu sampah sisa rumah tangga, sampah residu, dan sampah organik. Sampah-sampah tersebut nantinya akan diambil oleh penggerobak pada hari tertentu sesuai jadwal untuk dibuang ke *mobile depo*, yaitu berupa truk pengangkut sampah yang menunggu di satu titik lokasi. Pada tahap awal Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memperoleh bantuan dari Kadipaten Puro Pakualaman yang berkerja sama dengan BumDes Panggungharjo berkaitan dengan penyediaan seragam penggerobak dan kendaraan pengangkutan sampah kemudian untuk saat ini Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berkaitan dengan pembuangan dan penjemputan sampah dari penggerobak.

Tabel 2.8

Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
○ Kesehatan ○ Pekerjaan umum dan penataan ruang ○ Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ○ Lingkungan hidup ○ Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ○ Sosial ○ Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	○ Belum optimalnya pengelolaan sampah di wilayah Kemantren Pakualaman ○ Penutupan TPST Piyungan berdampak pada sistem pengelolaan sampah lokal ○ Pembangunan sarana-prasarana di kelurahan masih perlu pendampingan OPD Teknis ○ Masih terdapat warga masyarakat yang kurang mematuhi Peraturan Daerah ○ Masih terdapat warga masyarakat yang belum memehami terkait mitigasi bencana ○ Pelaksanaan standar operasional pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ○ Permasalahan pemberdayaan masyarakat yang belum merata dan belum optimalnya program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan	○ Pengelolaan Persampahan dan limbah belum optimal (Pilar Lingkungan) ○ Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi (Pilar Sosial) ○ Ancaman bencana dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan) ○ Penegakan hukum terkait keamanan, ketenteraman, dan ketertiban (Pilar Hutakel) ○ Tantangan terhadap pendidikan dan kualitas SDM yang berdaya saing global (Pilar Sosial)	○ Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota ○ Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) ○ Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global ○ Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	○ Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan ○ Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan ○ Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana ○ Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional	○ Inplikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia ○ Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional ○ Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	○ Pengelolaan Sampah ○ Pembangunan Kewilayahan ○ Siaga Bencana Lahar Dingin ○ Siaga Bencana Kebakaran ○ Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat ○ Keterbukaan Informasi Publik ○ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ○ Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan impelementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus di realisasikan oleh pemerintah daerah.

Perumusan tujuan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin diraih melalui pelaksanaan program-program prioritas. Tujuan pembangunan yang ditetapkan mencakup beragam fokus pembangunan, seperti penguatan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, pelestarian lingkungan hidup, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, maka Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta. Adapun tujuan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu ***"Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman."***

Tujuan ini akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu ***"Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman."*** Pada awal Renstra (tahun 2025) target yang ditetapkan adalah 522,2 poin, sedangkan target akhir Renstra (tahun 2029) adalah 524,6 poin.

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi arah dan fokus capaian yang ingin diraih dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih operasional, terukur, dan terarah untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, adalah "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman", maka Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman**
   Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama ini adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman. Pada awal Renstra (tahun 2025) target yang ditetapkan adalah 407,5 poin, sedangkan target akhir Renstra (tahun 2029) adalah 409,5 poin.
2. **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif**
   Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kedua ini adalah Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman. Pada awal Renstra (tahun 2025) target yang ditetapkan adalah A nilai (89,993-90,000), sedangkan target akhir Renstra (tahun 2029) adalah A nilai (89,994-90,000).

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Kalimat kondisi;
- Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

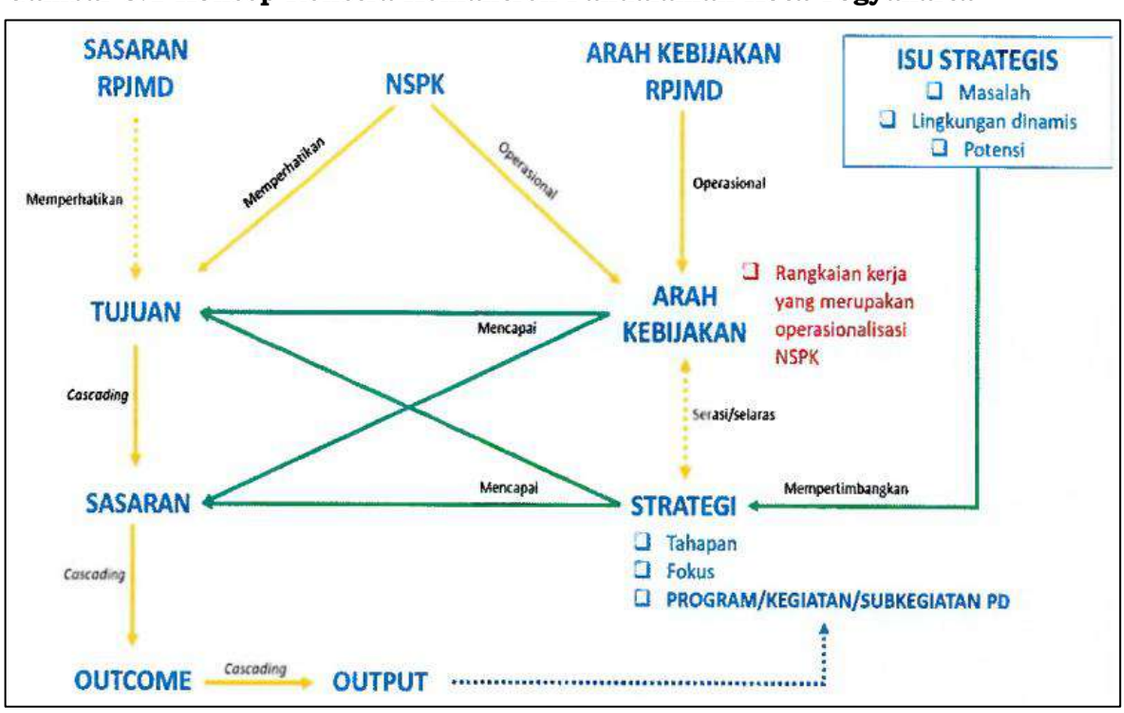

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

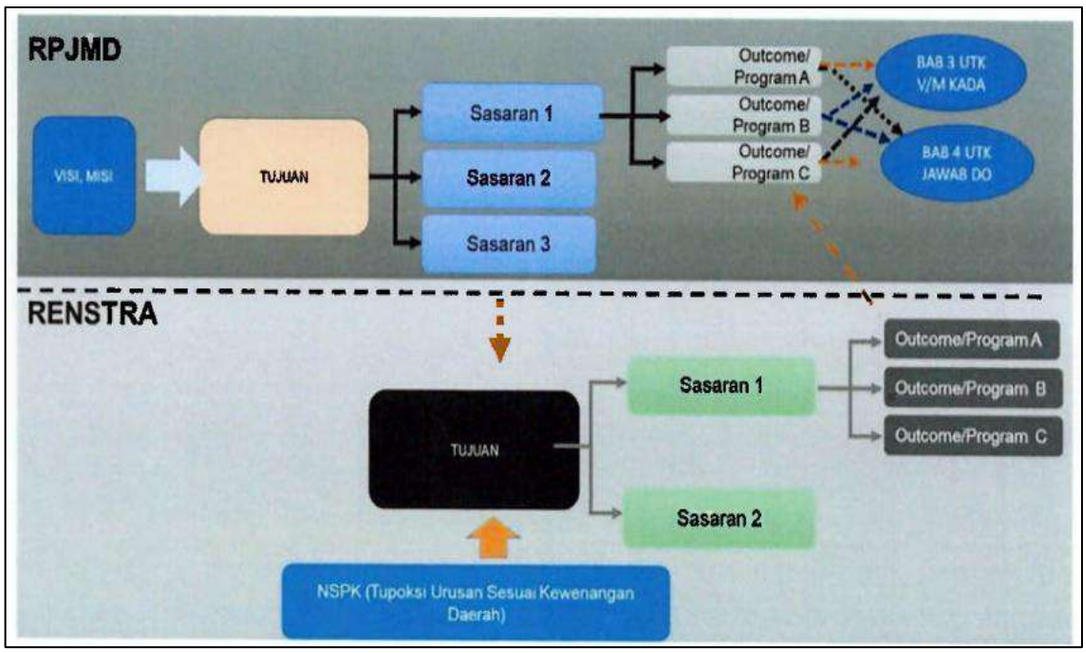

Adapun terkait dengan rumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam penentuan targetnya menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.11.0000 - Kemantren Pakualaman											
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman		indeks pembangunan Kemantren Pakualaman (Poin)	522,2	522,2	522,6	523,2	523,8	524,2	524,6	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman (poin)	407,5	407,5	408	408.5	409	409.5	410	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman (Nilai)	A (89,993)	A (89,993-90,000)	A (89,993-90,000)	A (89,993-90,000)	A (89,994-90,000)	A (89,994-90,000)	A (89,994-90,000)	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagai "Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup PD. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Rumusan strategi dalam mendukung tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Kreatif Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	1.1 Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman 1.2 Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat 1.3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Pakualaman 1.4 Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman
				2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	2.1 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman

3.3.1. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan strategi perencanaan tahapan kerja tahunan yang disusun secara sistematis dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penahapan ini menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode lima tahun perencanaan.

Setiap tahapan pembangunan dirancang berdasarkan pendekatan berkelanjutan (*sustainability*), dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, urgensi penyelesaian isu strategis, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Penahapan ini juga memperhatikan sinergi antar program dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan, agar setiap sasaran strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tahap pertama yang dilakukan adalah internalisasi rencana strategis tahun 2025-2029 kepada seluruh internal pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, baik ASN maupun non ASN beserta *stakeholder* terkait, yaitu Polsek, Koramil, KUA, dan Puskesmas terkait rencana selama kurang lebih 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dimulai dengan memetakan kondisi wilayah dimana pada tahapan ini kemantren mengumpulkan data dan informasi untuk memahami masalah dan potensi di suatu wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan program pembangunan yang direncanakan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan rill masyarakat.

Tahap kedua ketika internalisasi sudah mulai berjalan, agenda yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dengan memberikan pelatihan kepada aparatur untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menyediakan saluran yang mudah di akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya agar peta kebutuhan masyarakat dapat akurat maka perlu adanya partisipasi lebih dari masyarakat dalam perencanaan. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan forum resmi dimana masyarakat, tokoh, dan perwakilan pemerintah bertemu untuk merumuskan prioritas pembangunan. Keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam musrenbang menjadi kunci penyusunan kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh suatu program, seperti instansi pemerintah lain, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Peningkatan koordinasi sangat penting untuk menghindari tumpeng tindih program dan memaksimalkan hasil. Salah satu langkah yang ditempuh dengan membuat kesepakatan atau nota kerja sama, mengikat komitmen antar pihak untuk menjalankan program bersama-sama.

Tahap ketiga untuk memastikan target tercapai diperlukan adanya akselerasi dengan fokus pada program prioritas, yaitu mengidentifikasi program yang paling penting dan mengalokasikan sumber daya lebih banyak ke sana, menyederhanakan alur kerja untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta menerapkan pendekatan atau metode baru yang lebih efektif dalam menjalankan program. Selain

itu, perlu diadakan evaluasi tengah tahun untuk meninjau kembali kemajuan yang telah dicapai di tengah perjalanan implementasi rencana strategis. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan. Mencari tahu apa saja hambatan yang dapat menghambat pencapaian target, serta menyesuaikan strategi atau program jika diperlukan untuk memastikan tujuan akhir tetap tercapai. Selain itu, agar target kedepan dapat tercapai dilakukan juga penegakan sanksi dan penghargaan dengan menerapkan konsekuensi yang jelas bagi kinerja yang buruk dan memberikan apresiasi untuk kinerja yang baik.

Tahap keempat pemantapan hasil dilakukan dengan mengamankan dan mengokohkan dampak dari program-program yang sudah berjalan. Integrasi sistem data menghubungkan berbagai basis data pemerintah untuk mempercepat layanan dan mencegah duplikasi. Dibuktikan dengan melembagakan program, yaitu mengintegrasikan program yang sukses ke dalam struktur dan anggaran rutin, merancang mekanisme agar program bisa terus berjalan tanpa intervensi besar, mendokumentasikan praktik terbaik dan pelajaran yang didapat dari pelaksanaan program. Sinergi antar lembaga pada tahap ini juga sudah mulai terbentuk, salah satunya dengan memanfaatkan jaringan lembaga masyarakat untuk menyebarkan informasi atau memberikan bantuan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Agar program tersebut dapat berjalan lancar tentunya juga perlu adanya dukungan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan, memberdayakan peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan lembaga sipil seperti BKO Satpol PP dan Linmas, pendekatan dialogis ketika terjadi konflik sosial dengan cara-cara damai dan persuasif.

Tahap kelima ini adalah langkah pertama di tahap akhir. Fokusnya adalah mengumpulkan dan merangkum semua data, laporan, dan capaian dari program-program yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang sudah tercapai, baik dalam bentuk fisik (misalnya, jumlah jalan yang dibangun) maupun non fisik (misalnya, peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat). Konsolidasi ini sangat penting sebagai bahan dasar untuk evaluasi. Penguatan keberlanjutan program unggulan, poin ini menekankan pentingnya memastikan program-program yang berhasil dan dianggap “unggulan” dapat terus berjalan setelah siklus perencanaan berkahir. Ini bukan hanya tentang melanjutkan kegiatan, tetapu juga tentang memastikan program tersebut memiliki fondasi yang kuat dilakukan dengan membangun kapasitas melatih sumber daya manusia agar mampu melanjutkan program, memastikan keberlanjutan pendanaan dan penganggaran. Finalisasi capaian tujuan dan sasaran adalah langkah formal untuk menyimpulkan apakah semua tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan di awal telah tercapai. Tim akan membandingkan hasil akhir dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan final ini akan menjadi catatan resmi mengenai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil finalisasi ini juga akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rekomendasi dilaksanakan untuk perencanaan periode berikutnya. Ini adalah puncak dari seluruh proses evaluasi. Berdasarkan semua data yang telah dikonsolidasi, hasil yang difinalisasi, dan pembelajaran dari program yang telah berjalan, organisasi menyusun rekomendasi strategis untuk rencana di periode selanjutnya. Rekomendasi ini bersifat kritis karena akan menjadi masukan utama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan, menentukan prioritas baru, merancang strategi yang lebih efektif dan efisien di masa depan, menghindari kesalahan yang sama di siklus perencanaan berikutnya.

Melalui penahapan pembangunan ini, diharapkan Perangkat Daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta mewujudkan visi dan misi daerah dengan hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 3.3

Tahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
○ Penguatan fondasi tata kelola pemerintahan	○ Optimalisasi pelayanan publik	○ Akselerasi capaian sasaran strategis	○ Pemantapan hasil program dan kegiatan strategis	○ Konsolidasi hasil pembangunan
○ Identifikasi kebutuhan pembangunan wilayah	○ Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	○ Evaluasi tengah periode	○ Penguatan ketertiban dan ketentraman wilayah	○ Penguatan keberlanjutan program unggulan
○ Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan	○ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder	○ Pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas	○ Peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi	○ Finalisasi capaian tujuan dan sasaran
○ Konsolidasi data dan sinergi program lintas sektor	○ Awal pelaksanaan program prioritas infrastruktur wilayah	○ Replikasi praktik baik pelayanan pemerintahan	○ Penguatan sinergi lembaga masyarakat	○ Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan periode berikutnya

3.3.2. Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman 2. Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	
		2. Meningkatnya Peran Serta Dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	1. Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3. Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun 4. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan 5. Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan 6. Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan 7. Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan 8. Meningkatnya peran lembaga masyarakat	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dalam mitigasi dan penanganan bencana	
		3. Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya operasi ketertiban 2. Meningkatnya koordinasi Perda dan Perkada	
		4. Meningkatnya Sinergitas *Stakeholder* Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 2. Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Pakualaman	1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Pakualaman 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Pakualaman 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman 4. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Pakualaman 5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Pakualaman 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman 7. Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Pakualaman 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk nyata.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiaatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
      Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Gunungketur
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   4) Pemeliharaan Mebel
   5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Evaluasi Kelurahan

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.11.0000 - Kemantren Pakualaman							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman				indeks pembangunan Kemantren Pakualaman (Poin)		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman (Poin)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman)		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Presentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik (Presentase)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (Presentase)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (Dokumen)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 – Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (Presentase)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Presentase)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Presentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Presentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana (Presentase)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Pakualaman		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (Presentase)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP (Presentase)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP (Presentase)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Presentase)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Presentase)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan (Presentase)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Purwokinanti)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Presentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gunungketur)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Presentase)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Pakualaman (Kelurahan Purwokinanti)	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Presentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Presentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman (Kelurahan Gunungketur)		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun (Presentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Presentase)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman (Nilai)		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman		Nilai Sakip Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Pakualaman	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman (Presentase)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Pakualaman (Presentase)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Kemantren Pakualaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Pakualaman	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Pakualaman	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Pakualaman	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman (Presentase)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman (Nilai)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman)	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)	100	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 – SEKRETARIAT DAERAH				240.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				240.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gunungketur)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				240.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Purwokinanti)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				240.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	40.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				240.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				8.008.678.687		8.308.328.311		8.477.314.203		8.692.484.210		8.928.794.999		9.236.261.624		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.641.412.147		5.844.781.190		5.963.660.166		6.115.028.957		6.281.269.963		6.497.568.005		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman	Nilai SPIP Kemantren Pakualaman (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	5.641.412.147	Terkelola dan Terukur	5.844.781.190	Terkelola dan Terukur	5.963.660.166	Terkelola dan Terukur	6.115.028.957	Terkelola dan Terukur	6.281.269.963	Terkelola dan Terukur	6.497.568.005	7.01.4.01.2.22.11.0000 - Kemantren Pakualaman	
	Nilai Sakip Kemantren Pakualaman (Nilai)	A	A		A		A		A		A		A			
	Nilai IKM Kemantren Pakualaman (Nilai)	88,33	88,4		88,5		88,6		88,7		88,8		88,85			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.353.600		13.743.600		14.019.000		14.371.000		14.758.000		15.263.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	18.353.600	12	13.743.600	12	14.019.000	12	14.371.000	12	14.758.000	12	15.263.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5		4		4		4		4		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.990.000		2.630.000		2.683.000		2.751.000		2.825.000		2.922.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.990.000	4	2.630.000	4	2.683.000	4	2.751.000	4	2.825.000	5	2.922.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.506.800		2.506.800		2.557.000		2.621.000		2.692.000		2.784.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.506.800	1	2.506.800	1	2.557.000	1	2.621.000	1	2.692.000	1	2.784.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.506.800		2.506.800		2.557.000		2.621.000		2.692.000		2.784.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.506.800	1	2.506.800	1	2.557.000	1	2.621.000	1	2.692.000	1	2.784.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				575.000		575.000		586.000		600.000		616.000		637.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	575.000	1	575.000	1	586.000	1	600.000	1	616.000	1	637.000		
7.01.01.2.01.0005 -Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				575.000		575.000		586.000		600.000		616.000		637.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	575.000	1	575.000	1	586.000	1	600.000	1	616.000	1	637.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.625.000		4.675.000		4.770.000		4.891.000		5.023.000		5.195.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	8.625.000	12	4.675.000	12	4.770.000	12	4.891.000	12	5.023.000	12	5.195.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				575.000		275.000		280.000		287.000		294.000		304.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	575.000	1	275.000	1	280.000	1	287.000	1	294.000	1	304.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.319.956.000		4.282.717.000		4.369.842.166		4.480.775.957		4.602.596.963		4.761.096.005		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.319.956.000	1	4.282.717.000	1	4.369.842.166	1	4.480.775.957	1	4.602.596.963	1	4.761.096.005		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	28		29		29		29		29		29			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.278.128.000		4.240.433.000		4.326.701.166		4.436.542.957		4.557.164.963		4.714.102.005		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	28	4.278.128.000	29	4.240.433.000	29	4.326.701.166	29	4.436.542.957	29	4.557.164.963	29	4.714.102.005		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				575.000		330.000		336.000		344.000		353.000		365.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	575.000	12	330.000	12	336.000	12	344.000	12	353.000	12	365.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.150.000		550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.150.000	12	550.000	12	561.000	12	575.000	12	590.000	12	610.000		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				36.768.000		38.904.000		39.695.000		40.702.000		41.808.000		43.247.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	36.768.000	12	38.904.000	12	39.695.000	12	40.702.000	12	41.808.000	12	43.247.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				575.000		575.000		586.000		600.000		616.000		637.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	575.000	1	575.000	1	586.000	1	600.000	1	616.000	1	637.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				460.000		275.000		280.000		287.000		294.000		304.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	460.000	1	275.000	1	280.000	1	287.000	1	294.000	1	304.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.725.000		1.100.000		1.122.000		1.150.000		1.181.000		1.221.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.725.000	12	1.100.000	12	1.122.000	12	1.150.000	12	1.181.000	12	1.221.000		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				575.000		550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	575.000	1	550.000	1	561.000	1	575.000	1	590.000	1	610.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.220.000		1.980.000		2.016.000		2.063.000		2.117.000		2.189.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.220.000	2	1.980.000	2	2.016.000	2	2.063.000	2	2.117.000	2	2.189.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	31	31		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	12	12		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				460.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	31	31	460.000	2	440.000	2	448.000	2	459.000	2	471.000	2	487.000		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				460.000		220.000		224.000		229.000		235.000		243.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	224.000	1	229.000	1	235.000	1	243.000		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				460.000		220.000		224.000		229.000		235.000		243.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	12	12	460.000	1	220.000	1	224.000	1	229.000	1	235.000	1	243.000		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				460.000		220.000		224.000		229.000		235.000		243.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	460.000	1	220.000	1	224.000	1	229.000	1	235.000	1	243.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				460.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	460.000	2	440.000	2	448.000	2	459.000	2	471.000	2	487.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				460.000		220.000		224.000		229.000		235.000		243.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	460.000	1	220.000	1	224.000	1	229.000	1	235.000	1	243.000		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				460.000		220.000		224.000		229.000		235.000		243.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	460.000	1	220.000	1	224.000	1	229.000	1	235.000	1	243.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.380.000		1.320.000		1.344.000		1.377.000		1.413.000		1.461.000		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	1.380.000	2	1.320.000	2	1.344.000	2	1.377.000	2	1.413.000	2	1.461.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				460.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	460.000	2	440.000	2	448.000	2	459.000	2	471.000	2	487.000		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				460.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	2	2	460.000	2	440.000	2	448.000	2	459.000	2	471.000	2	487.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Informasi Kepegawaian (Dokumen)															
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				460.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	2	460.000	2	440.000	2	448.000	2	459.000	2	471.000	2	487.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.232.447		145.855.940		148.820.000		152.596.000		156.742.000		162.136.000		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Pakualaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	173.232.447	3	145.855.940	3	148.820.000	3	152.596.000	3	156.742.000	3	162.136.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	95		46		46		46		46		46			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.179.602		6.186.460		6.312.000		6.472.000		6.647.000		6.875.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	6.179.602	3	6.186.460	3	6.312.000	3	6.472.000	3	6.647.000	3	6.875.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.415.345		44.037.265		44.932.000		46.072.000		47.324.000		48.953.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	47.415.345	9	44.037.265	9	44.932.000	9	46.072.000	9	47.324.000	9	48.953.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.032.200		36.032.200		36.765.000		37.698.000		38.723.000		40.056.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	36.032.200	3	36.032.200	3	36.765.000	3	37.698.000	3	38.723.000	3	40.056.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.030.300		19.400.015		19.794.000		20.296.000		20.847.000		21.564.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	18.030.300	3	19.400.015	3	19.794.000	3	20.296.000	3	20.847.000	3	21.564.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.575.000		40.200.000		41.017.000		42.058.000		43.201.000		44.688.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	95	65.575.000	46	40.200.000	46	41.017.000	46	42.058.000	46	43.201.000	46	44.688.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				39.731.550		105.478.050		107.623.000		110.354.000		113.354.000		117.257.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	19	39.731.550	19	105.478.050	19	107.623.000	19	110.354.000	19	113.354.000	19	117.257.000		
7.01.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.731.550		105.478.050		107.623.000		110.354.000		113.354.000		117.257.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	19	39.731.550	19	105.478.050	19	107.623.000	19	110.354.000	19	113.354.000	19	117.257.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				735.614.000		969.674.000		989.396.000		1.014.505.000		1.042.088.000		1.077.977.000		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	735.614.000	12	969.674.000	12	989.396.000	12	1.014.505.000	12	1.042.088.000	12	1.077.977.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	135	135		110		110		110		110		110			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.550.000		1.550.000		1.581.000		1.621.000		1.665.000		1.722.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	135	135	1.550.000	110	1.550.000	110	1.581.000	110	1.621.000	110	1.665.000	110	1.722.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.200.000		139.200.000		142.031.000		145.635.000		149.594.000		154.746.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	139.200.000	12	139.200.000	12	142.031.000	12	145.635.000	12	149.594.000	12	154.746.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				594.864.000		828.924.000		845.784.000		867.249.000		890.829.000		921.509.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	594.864.000	12	828.924.000	12	845.784.000	12	867.249.000	12	890.829.000	12	921.509.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				349.924.550		324.012.600		330.600.000		338.987.000		348.201.000		360.189.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Pakualaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4	349.924.550	4	324.012.600	4	330.600.000	4	338.987.000	4	348.201.000	4	360.189.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	60		51		51		51		51		51			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	17	40		10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	16		14		14		14		14		14			
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.114.700		29.897.450		30.505.000		31.279.000		32.129.000		33.235.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	1	20.114.700	1	29.897.450	1	30.505.000	1	31.279.000	1	32.129.000	1	33.235.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.494.850		52.494.850		53.562.000		54.921.000		56.414.000		58.356.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	16	54.494.850	14	52.494.850	14	53.562.000	14	54.921.000	14	56.414.000	14	58.356.000		
7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				200.000		400.000		408.000		418.000		429.000		443.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2	2	200.000	2	400.000	2	408.000	2	418.000	2	429.000	2	443.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.230.000		2.230.000		2.275.000		2.332.000		2.395.000		2.477.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	17	40	2.230.000	10	2.230.000	10	2.275.000	10	2.332.000	10	2.395.000	10	2.477.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.885.000		65.490.300		66.822.000		68.517.000		70.379.000		72.802.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	60	20.885.000	51	65.490.300	51	66.822.000	51	68.517.000	51	70.379.000	51	72.802.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				252.000.000		173.500.000		177.028.000		181.520.000		186.455.000		192.876.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4	252.000.000	4	173.500.000	4	177.028.000	4	181.520.000	4	186.455.000	4	192.876.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				72.507.460		101.580.460		103.646.539		106.277.281		109.166.498		112.925.690		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	117,5	117,5	72.507.460	118	101.580.460	118,5	103.646.539	119,5	106.277.281	120	109.166.498	120,5	112.925.690	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				33.320.000		75.014.000		76.540.539		78.484.281		80.619.498		83.396.690		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	1	33.320.000	1	75.014.000	1	76.540.539	1	78.484.281	1	80.619.498	1	83.396.690		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				33.320.000		75.014.000		76.540.539		78.484.281		80.619.498		83.396.690		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	1	33.320.000	1	75.014.000	1	76.540.539	1	78.484.281	1	80.619.498	1	83.396.690		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Umum	(Dokumen)															
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				39.187.460		26.566.460		27.106.000		27.793.000		28.547.000		29.529.000		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	39.187.460	12	26.566.460	12	27.106.000	12	27.793.000	12	28.547.000	12	29.529.000		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				6.171.500		3.721.500		3.797.000		3.893.000		3.998.000		4.135.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	6.171.500	12	3.721.500	12	3.797.000	12	3.893.000	12	3.998.000	12	4.135.000		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				33.015.960		22.844.960		23.309.000		23.900.000		24.549.000		25.394.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	33.015.960	12	22.844.960	12	23.309.000	12	23.900.000	12	24.549.000	12	25.394.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.108.540.080		2.284.990.661		2.331.465.857		2.390.642.798		2.455.633.964		2.540.194.701		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,5	194,5	319.723.000	195,5	348.532.845	196	355.622.857	196,5	364.655.798	197	374.561.964	197,5	387.453.701	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				105.405.000		99.535.000		101.565.857		104.155.798		106.985.964		110.667.701		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	105.405.000	12	99.535.000	12	101.565.857	12	104.155.798	12	106.985.964	12	110.667.701		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				105.405.000		99.535.000		101.565.857		104.155.798		106.985.964		110.667.701		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	105.405.000	12	99.535.000	12	101.565.857	12	104.155.798	12	106.985.964	12	110.667.701		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.842.734.580		1.975.992.816		2.016.181.000		2.067.348.000		2.123.556.000		2.196.687.000		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	53.917.500	1	39.535.000	1	40.338.000	1	41.361.000	1	42.484.000	1	43.946.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215		15		15		15		15		15			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				42.912.500		27.935.000		28.503.000		29.226.000		30.020.000		31.053.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215	42.912.500	15	27.935.000	15	28.503.000	15	29.226.000	15	30.020.000	15	31.053.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				11.005.000		11.600.000		11.835.000		12.135.000		12.464.000		12.893.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	11.005.000	1	11.600.000	1	11.835.000	1	12.135.000	1	12.464.000	1	12.893.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				29.567.500		72.842.845		74.323.000		76.208.000		78.279.000		80.974.000		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	28.647.500	12	59.552.845	12	60.764.000	12	62.306.000	12	64.000.000	12	66.204.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				28.647.500		59.552.845		60.764.000		62.306.000		64.000.000		66.204.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	28.647.500	12	59.552.845	12	60.764.000	12	62.306.000	12	64.000.000	12	66.204.000		
Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	920.000	4	13.290.000	4	13.559.000	4	13.902.000	4	14.279.000	4	14.770.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215		4		4		4		4		4			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		12.850.000		13.111.000		13.443.000		13.808.000		14.283.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga	1	1	0	4	12.850.000	4	13.111.000	4	13.443.000	4	13.808.000	4	14.283.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Kemasyarakatan)															
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				920.000		440.000		448.000		459.000		471.000		487.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	215	215	920.000	4	440.000	4	448.000	4	459.000	4	471.000	4	487.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				130.833.000		136.620.000		139.396.000		142.931.000		146.813.000		151.866.000		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50	65.348.000	50	57.250.000	50	58.414.000	50	59.896.000	50	61.524.000	50	63.642.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	40	40		40		40		40		40		40			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30.118.000		23.220.000		23.692.000		24.293.000		24.953.000		25.812.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50	30.118.000	50	23.220.000	50	23.692.000	50	24.293.000	50	24.953.000	50	25.812.000		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				35.230.000		34.030.000		34.722.000		35.603.000		36.571.000		37.830.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	40	40	35.230.000	40	34.030.000	40	34.722.000	40	35.603.000	40	36.571.000	40	37.830.000		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	20	50	13.640.000	50	5.060.000	50	5.162.000	50	5.293.000	50	5.436.000	50	5.623.000		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				13.640.000		5.060.000		5.162.000		5.293.000		5.436.000		5.623.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	20	50	13.640.000	50	5.060.000	50	5.162.000	50	5.293.000	50	5.436.000	50	5.623.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	55	35	51.845.000	35	74.310.000	35	75.820.000	35	77.742.000	35	79.853.000	35	82.601.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	35	35		35		35		35		35		35			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	35	35		35		35		35		35		35			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	35	40		40		40		40		40		40			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	185	185		185		185		185		185		185			
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				23.590.000		56.700.000		57.853.000		59.321.000		60.933.000		63.031.000		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	185	185	23.590.000	185	56.700.000	185	57.853.000	185	59.321.000	185	60.933.000	185	63.031.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15.325.000		6.660.000		6.795.000		6.967.000		7.156.000		7.402.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	35	35	15.325.000	35	6.660.000	35	6.795.000	35	6.967.000	35	7.156.000	35	7.402.000		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				2.760.000		2.570.000		2.622.000		2.688.000		2.761.000		2.856.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	35	35	2.760.000	35	2.570.000	35	2.622.000	35	2.688.000	35	2.761.000	35	2.856.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				6.720.000		3.790.000		3.867.000		3.965.000		4.072.000		4.212.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	35	40	6.720.000	40	3.790.000	40	3.867.000	40	3.965.000	40	4.072.000	40	4.212.000		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				3.450.000		4.590.000		4.683.000		4.801.000		4.931.000		5.100.000		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	55	35	3.450.000	35	4.590.000	35	4.683.000	35	4.801.000	35	4.931.000	35	5.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman (Kelurahan Gunungketur)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,5	194,5	843.019.250	195,5	973.290.166	196	993.086.000	196,5	1.018.289.000	197	1.045.975.000	197,5	1.081.997.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.842.734.580		1.975.992.816		2.016.181.000		2.067.348.000		2.123.556.000		2.196.687.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	206	206	522.109.000	11	631.429.900	11	644.273.000	11	660.624.000	11	678.586.000	11	701.956.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				522.109.000		631.429.900		644.273.000		660.624.000		678.586.000		701.956.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	206	206	522.109.000	11	631.429.900	11	644.273.000	11	660.624.000	11	678.586.000	11	701.956.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	64	10	320.910.250	9	341.860.266	9	348.813.000	9	357.665.000	9	367.389.000	9	380.041.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				320.910.250		341.860.266		348.813.000		357.665.000		367.389.000		380.041.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	64	10	320.910.250	9	341.860.266	9	348.813.000	9	357.665.000	9	367.389.000	9	380.041.000		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman (Kelurahan Purwokinanti)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,5	194,5	945.797.830	195,5	963.167.650	196	982.757.000	196,5	1.007.698.000	197	1.035.097.000	197,5	1.070.744.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.842.734.580		1.975.992.816		2.016.181.000		2.067.348.000		2.123.556.000		2.196.687.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	249	249	660.746.680	11	738.810.400	11	753.837.000	11	772.969.000	11	793.986.000	11	821.330.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				660.746.680		738.810.400		753.837.000		772.969.000		793.986.000		821.330.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	249	249	660.746.680	11	738.810.400	11	753.837.000	11	772.969.000	11	793.986.000	11	821.330.000		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	10	285.051.150	8	224.357.250	8	228.920.000	8	234.729.000	8	241.111.000	8	249.414.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				285.051.150		224.357.250		228.920.000		234.729.000		241.111.000		249.414.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	10	285.051.150	8	224.357.250	8	228.920.000	8	234.729.000	8	241.111.000	8	249.414.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				82.005.000		24.044.000		24.533.039		25.155.733		25.839.608		26.729.405		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Pakualaman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	82.005.000	100	24.044.000	100	24.533.039	100	25.155.733	100	25.839.608	100	26.729.405	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				82.005.000		24.044.000		24.533.039		25.155.733		25.839.608		26.729.405		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	82.005.000	12	24.044.000	12	24.533.039	12	25.155.733	12	25.839.608	12	26.729.405		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				82.005.000		24.044.000		24.533.039		25.155.733		25.839.608		26.729.405		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	82.005.000	12	24.044.000	12	24.533.039	12	25.155.733	12	25.839.608	12	26.729.405		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				104.214.000		52.932.000		54.008.602		55.379.441		56.884.966		58.843.823		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	104.214.000	100	52.932.000	100	54.008.602	100	55.379.441	100	56.884.966	100	58.843.823	7.01.4.01.2.22.11.00 00 - Kemantren Pakualaman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				104.214.000		52.932.000		54.008.602		55.379.441		56.884.966		58.843.823		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	275	275	70.734.000	275	21.115.000	270	21.544.602	270	22.092.441	265	22.692.966	265	23.474.823		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70.734.000		21.115.000		21.544.602		22.092.441		22.692.966		23.474.823		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	275	275	70.734.000	275	21.115.000	270	21.544.602	270	22.092.441	265	22.692.966	265	23.474.823		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	1	33.480.000	1	31.817.000	1	32.464.000	1	33.287.000	1	34.192.000	1	35.369.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				33.480.000		31.817.000		32.464.000		33.287.000		34.192.000		35.369.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	1	33.480.000	1	31.817.000	1	32.464.000	1	33.287.000	1	34.192.000	1	35.369.000		

4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
    a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
    c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
    a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
    b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
    c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
    a. Bela Beli Produk Warga
    b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
    c. Modernisasi Pasar Rakyat
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
    a. Revitalisasi Kampung Wisata
    b. Ekonomi Olahraga; dan
    c. Penguatan Akses Pendanaan Pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
    a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi
    b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
    c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
    a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
    b. Kampung Layak Huni
    c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
    a. Menguatkan Kelembagaan dalam Rangka Melaksanakan Sebagian Urusan Keistimewaan
    b. Pemajuan Kebudayaan untuk Kesejahteraan Masyarakat
    c. Mengembangkan Tata Ruang Keistimewaan
    d. Memperkokoh Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kesejahteraan, Kepentingan Sosial, dan Pengembangan Kebudayaan
    e. Memperkuat Akses Dana Keistimewaan untuk Warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
    a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
    b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
    c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan berbagai program perangkat daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Priotitas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan: 1) Peningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan b. Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan: 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2) Evaluasi Kelurahan 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti) 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur) 5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti) 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur) c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, sub kegiatan: 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sub kegiatan: 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Ekonomi Rakyat	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan: a. Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan: 1) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti) 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur) b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, sub kegiatan: 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Kepastian Hukum	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan: a. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, sub kegiatan: 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, sub kegiatan: 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kegiatan: a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sub kegiatan: 1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Warga	Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan: a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sub kegiatan: 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.11.0000 – Kemantren Pakualaman									
2.	indeks pembangunan Kemantren Pakualaman	Poin	522,2	522,2	522,6	523,2	523,8	524,2	524,6	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Nilai	A (89,993)	A (89,993-90,000)	A (89,993-90,000)	A (89,993-90,000)	A (89,994-90,000)	A (89,994-90,000)	A (89,994-90,000)	
4.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	poin	407,5	407,5	408	408,5	409	409,5	410	

BAB V
PENUTUP

Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Hal ini tidak terlepas dari isi renstra itu sendiri yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kota Yogyakarta.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta setiap tahunnya sebagai dasar dalam menjalankan program dan kegiatan ditahun berjalan serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren pakualaman Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Akan tetapi Renstra ini bukanlah suatu keputusan yang bersifat final dan mutlak. Tidak bisa dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu selama 5 tahun ke depan terdapat berbagai dinamika ditingkat pusat maupun daerah baik itu berubahnya kebijakan, perubahan arah prioritas pembangunan nasional maupun daerah, maupun perubahan lain yang bersifat mendesak. Oleh karena itu Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat diperbaharui dan di evaluasi setiap tahunnya mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Semoga dengan tersusunnya Renstra Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pelecut semangat bagi seluruh aparatur pemerintahan di Kemantren Pakualaman agar target-target yang tertuang dapat tercapai sehingga masyarakat lebih berdaya, lebih sejahtera dan lebih maju merasakan dampak positif pembangunan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

POHON KINERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja
Indeks Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pembangunan Kementrian Pekerjaan

Indikator Kinerja
Indeks pembangunan Kementrian Pekerjaan

SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya pembangunan pembangunan Kementrian Pekerjaan

INDIKATOR KINERJA
Nilai evaluasi pembangunan pembangunan Kementrian Pekerjaan

Meningkatnya Pelayanan Perumahmukiman Kementrian Pekerjaan
Indikator Kinerja :
Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan Kesehatan Perumahan
Indikator :
Persentase warga yang terfasilitasi

Terfasilitasinya Koordinasi/Sinergi dengan Pemangku Kepentingan untuk Terlibat yang Terkait dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan Permukiman
Indikator :
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Pemangku Kepentingan untuk Terlibat yang Terkait dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan Permukiman

Meningkatnya Penggunaan Layanan yang Terfasilitasi
Indikator :
Persentase penggunaan layanan yang terfasilitasi sesuai SOP

Terfasilitasinya Proses Pemenuhan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Usaha
Indikator :
Jumlah Dokumen dan Perizinan Usaha yang Diterbitkan

Terfasilitasinya Proses Pemenuhan yang berkait dengan Nomor Induk
Indikator :
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan

Meningkatnya Perwa Serta dan Strategitas Lembaga Masyarakat
Indikator Kinerja :
Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan

Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat
Indikator :
Persentase fasilitasi pembangunan masyarakat kelurahan

Terfasilitasinya Pembangunan Baru/rehabilitasi di Kelurahan
Indikator :
Jumlah Pihkmas dan Dinas yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Masyarakat di Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
Indikator :
Persentase warana prasarana lingkungan

Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator :
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terlengkapi

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi

Terfasilitasinya Rembuk Kelurahan
Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Rembuk Kelurahan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi

Terfasilitasinya Pembangunan Baru/rehabilitasi di Kelurahan
Indikator :
Jumlah Pihkmas dan Dinas yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Masyarakat di Kelurahan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi

Terfasilitasinya Rembuk Kelurahan
Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Rembuk Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat
Indikator :
Persentase fasilitasi pembangunan masyarakat kelurahan

Terfasilitasinya Pembangunan Baru/rehabilitasi di Kelurahan
Indikator :
Jumlah Pihkmas dan Dinas yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Masyarakat di Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat
Indikator :
Persentase warana prasarana lingkungan

Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Indikator :
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terlengkapi

**Meningkatnya Kualitas Pemberdaya

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
KEMANTREN PAKUALAMAN

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Kemantren Pakualaman**	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman	Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman	80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	522,2	522,4	522,2	523,8	524,2	524,6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	Program Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Pakualaman	Nilai SAKIP Kemantren Pakualaman Nilai SPIP Kemantren Pakualaman Nilai IKM Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Mantri Anom	A (87,91 - 88,00) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) 88,40	A (88,12 - 89,00) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) 88,50	A (88,20 - 89,00) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) 88,60	A (88,30 - 88,00) Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500) 88,70	A (88,45 - 89,00) Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500) 88,80	A (88,55 - 89,00) Terkelola dan terukur (4,174 - 4,500) 88,85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Pakualaman	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang wajib disusun	Sub. Bag Kes PEP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub. Bag Kea PIP	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen
																																Persentase keterwakilan data statistik sektoral Kemantren Pakualaman	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub. Bag Kea PIP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub. Bag Kea PIP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Pakualaman	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Sub. Bag Kes PEP	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub. Bag Kea PIP	28 Orang bula n	29 Orang bula n	29 Orang bula n	29 Orang bula n	29 Orang bula n	29 Orang bula n
																																								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub. Bag Kea PIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub. Bag Kea PIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub. Bag Kea PIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub. Bag Kea PIP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terwujudnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub. Bag Kea PIP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pregnosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Pregnosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pregnosis Realisasi Anggaran	Sub. Bag Kea PIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terwujudnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	31 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																																							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																							Koordinasi dan Pemilaan Barang Milik Daerah SKPD	Terwujudnya Laporan Hasil Pemilaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
																																							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Pakualaman	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian IP ASN Kemantren Pakualaman oleh BKPSDM	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	84,88 nilai	84,98 nilai	84,88 nilai	84,90 nilai	84,90 nilai	84,95 nilai	Penilaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penilaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																																						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																																						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Pakualaman	Persilan pengaresan arsip Administrasi Umum Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian pengaresan arsip administrasi umum	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	81,22 nilai	81,22 nilai	81,22 nilai	81,30 nilai	81,30 nilai	81,35 nilai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
																																						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket
																																						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
																																						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	6 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
																																						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	93 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	46 Laporan
																						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai pengunaan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit
																						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Pakualaman	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Pakualaman dikali 100%	Jumlah belanja Kemantren Pakualaman yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Pakualaman dikali 100%	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	135 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan
																																						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Jaca Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jaca Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jaca Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
																															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fasilitas pengelolaan aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	5 nilai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
																																								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	16 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit
																																							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
																																							Pemeliharaan Mebel	Terlaksanannya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	40 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
																																							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	60 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit
																																							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
											Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	407,5	408	408,5	409	409,5	410	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum	117,5	118	118,5	119	119	119,5	Koordinasi Pemerintahan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	Jawatan Kemakmuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan Kemakmuran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	Jawatan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jawatan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jawatan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Kemakmuran, Kelurahan	194,5	194,5	194,5	194,5	194,5	195,5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga	Jawatan Sosial	24 lembaga	24 lembaga	24 lembaga	24 lembaga	24 lembaga	24 lembaga	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Sosial	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																													Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Kecetetan Permendagri	Jumlah Dokumen	Jawatan Praja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jawatan Praja	215 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan
																															Jumlah Dokumen Musrenbang yang Diawasi secara Tepat	Jumlah Dokumen Musrenbang	Evaluasi Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen																		

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030
																															Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dikalkulasikan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksanannya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jawatan Sosial	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga
																															Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dikalkulasikan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Jawatan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketersediaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksanannya Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketersediaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketersediaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jawatan Sosial	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga
																				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematen Pakualaman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Persentase pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman) x 100%	Jawatan Kemasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan	Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	Jawatan Kemasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksanannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jawatan Kemasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																															Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi penegakan perda dan perkada	Terlaksanannya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Jawatan Kemasan	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi
																				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren dibagi hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti) x 100%	Jawatan Kemasan dan Jawatan Praja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	Jawatan Kemasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksanannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Kemasan	275 Orang	275 Orang	270 Orang	270 Orang	265 Orang	265 Orang
																															Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	Jawatan Praja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Praja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
									Target	Target	Target	Target	Target		Target
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman	Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)					80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	522,2	522,2	522,6	523,2	523,8	524,2	524,2	524,6
						Sumber Data:									
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purwokinanti	Poin	408	408	408	408	409	410	410	410
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gunungketur	Poin	407	407	408	409	409	409	409	410
						Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Pakualaman	Poin	981	981	981	982	983	983	983	983
			1.1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	407,5	407,5	408	408,5	409	409,5	409,5	410
						Sumber data:									
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purwokinanti	Poin	408	408	408	408	409	410	410	410
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gunungketur	Poin	407	407	408	409	409	409	409	410
						Jumlah kelurahan		2	2	2	2	2	2	2	2
			1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (89,993)	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)
						Sumber Data:									
						Hasil penilaian RB Kemantren Pakualaman oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kemantren Pakualaman 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemantren Pakualaman 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kemantren Pakualaman 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Kemantren Pakualaman 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (89,993)	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,993 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)	A (89,994 - 90,000)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	Poin	117,5	117,5	118	118,5	119,5	120	120	120,5
									Sumber Data:									
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purwokinanti	Poin	118	118	118	118	120	120	120	120
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gunungketur	Poin	117	117	118	119	119	120	120	121
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik		Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber Data:									
									- Sarpras pelayanan umum berkondisi baik	Unit	200	200	202	205	207	209	209	210
									- Total Sarpras	Unit	200	200	202	205	207	209	209	210
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber Data:									
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP									
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi									
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	194,5	194,5	195,5	196	196,5	197	197	197,5
									Sumber Data:									
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purwokinanti	Poin	194	194	195	196	197	197	197	197
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gunungketur	Poin	195	195	196	196	196	197	197	198
									Jumlah kelurahan	kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	lembaga	23	24	24	24	24	24	24	24
									Sumber Data:									
									Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	23	24	24	24	24	24	24	24
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan		Jumlah Dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
									Sumber Data:									
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
							Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen Musrebang	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
									Sumber Data:									
									Jumlah Dokumen Musrenbang yang DIsusun secara Tepat Waktu	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Lembaga	250	250	250	250	250	250	250	250
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	Lembaga	250	250	250	250	250	250	250	250
					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	6							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	6							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan	Lembaga	144	144	145	146	147	148	148	149
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	Lembaga	144	144	145	146	147	148	148	149
					1.1.2.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	111	111	111	111	111	111	111	111
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	111	111	111	111	111	111	111	111
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
					1.1.2.6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data:									
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
									Jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan	lembaga	24	24	24	24	24	24	24	24
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	24	24	24	24	24	24	24	24
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan	lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Pakualaman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Angka	79	78	77	76	75	74	74	73
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Angka	79	78	77	76	75	74	74	73
					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren dibagi hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti) x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									Hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
					Daerah				Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah koordinasi forkopimtren yang dilaksanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									Jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman	Nilai Sakip Kemantren Pakualaman	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai > 50-60) C (Nilai > 30-50) D (Nilai > 0-30)					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (87,91)	A (87,91 - 88,00)	A (88,12 - 89,00)	A (88,20 - 89,00)	A (88,30 - 88,00)	A (88,45 - 89,00)	A (88,45 - 89,00)	A (88,55 - 89,00)
									Sumber data:									
									Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (87,91)	A (87,91 - 88,00)	A (88,12 - 89,00)	A (88,20 - 89,00)	A (88,30 - 88,00)	A (88,45 - 89,00)	A (88,45 - 89,00)	A (88,55 - 89,00)
			Nilai SPIP Kemantren Pakualaman	Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00					Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan terukur (4,172)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,174 - 4,500)
									Sumber data:									
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan terukur (4,172)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,172 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,173 - 4,500)	Terkelola dan terukur (4,174 - 4,500)
			Nilai IKM Kemantren Pakualaman						Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,33	88,40	88,50	88,60	88,70	88,80	88,80	88,85
									Sumber data:									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,33	88,40	88,50	88,60	88,70	88,80	88,80	88,85
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Pakualaman	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang wajib disusun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang disusun tepat waktu	Dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang wajib disusun	Dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Pakualaman		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Data	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah data statistik sektoral	Data	1	1	1	1	1	1	1	1

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Pakualaman	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Pakualaman		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Pakualaman oleh BKPSDM	Nilai	84,88	84,88	84,88	84,88	84,90	84,90	84,90	84,95
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Pakualaman oleh BKPSDM	Nilai	84,88	84,88	84,88	84,88	84,90	84,90	84,90	84,95
					1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Pakualaman	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Pakualaman		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	81,22	81,22	81,22	81,22	81,30	81,30	81,30	81,35
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	81,22	81,22	81,22	81,22	81,30	81,30	81,30	81,35
					1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
					1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Pakualaman	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman		Jumlah belanja Kemantren Pakualaman yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Pakualaman dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
									Sumber data :									
									Jumlah belanja Kemantren Pakualaman yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	9.025.949.859							
									Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman	Rupiah	9.025.949.859							
					1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Pakualaman	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Pakualaman oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2025 - 2029

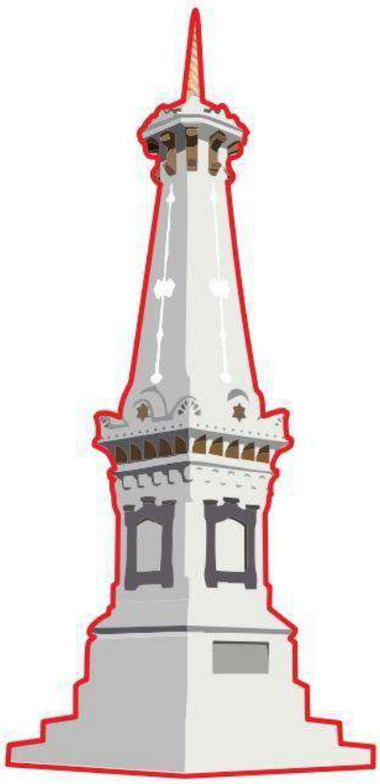

KEMANTREN MERGANGSAN
2025

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2025 – 2029

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga Rencana Strategis Kemantren Mergangsan ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 ini mendasarkan pada Surat Edaran Walikota Nomor 100.3.4/1561 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mergangsan di Tahun 2025 – 2029. Kami juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung tersedianya Rencana Strategis Kemantren Mergangsan ini. Masukan, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dapat menyempurnakan dokumen ini.

Yogyakarta, 15 September 2025
Mantri Pamong Praja,

Drs. SURADI, M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197110091992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 7
1.1. Latar Belakang ..... I - 7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 8
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 9
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS ..... II - 11
PERANGKAT DAERAH ..... II - 11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 11
2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah ..... II - 11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... II - 19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 22
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan ..... II - 26
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan ..... II - 26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... II - 27
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 27
2.2.2. Isu-Isu Strategis ..... II - 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ..... III - 34
3.1 Tujuan Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029; ..... III - 34
3.2 Sasaran Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029; ..... III - 35
3.3 Strategi Kemantren Mergangsan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... III - 36
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029 ..... III - 38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... IV - 39
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan ..... IV - 39
4.2 Program Prioritas ..... IV - 82
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV - 86
BAB V PENUTUP ..... V - 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2 -1 Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin ..... I - 20
Tabel 2 - 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural .....II - 20
Tabel 2 - 3 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .....II - 20
Tabel 2 - 4 Jumlah Pejabat Struktural Kemantren Mergangsan berdasarkan Eselon ....II - 21
Tabel 2 - 5 Daftar Sarana Prasarana Kemantren Mergangsan..... II - 21
Tabel 2 - 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2020-2024..... II - 23
Tabel 2 - 7 Capaian Kinerja Program PD Kemantren Mergangsan Tahun 2020-2024 ....II - 24
Tabel 2 - 8 Teknis Menyimpukan Isu Strategis Perangkat Daerah .....II - 32
Tabel 3 - 9 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta..III - 35
Tabel 3 - 10 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Yogyakarta .....III - 36
Tabel 3 - 11 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....III - 38
Tabel 3 - 12 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah .....III - 38
Tabel 4 - 13 Rumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra pada Kemantren Mergangsan Pemerintah Kota Yogyakarta .....IV - 444
Tabel 4 - 14 Rencana Program / Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta .....IV - 555
Tabel 4 - 15 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....IV - 855
Tabel 4 - 16 *Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Yogyakarta* .....IV - 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Bagan Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan.....19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun) dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD).

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Mergangsan ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2025 – 2029. Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah umum berdasarkan azas otonomi dan sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 116 tahun 2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta. Adapun urusan yang diampu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021, maka program di Kemantren Mergangsan terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.
8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kematren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penglolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43)
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51)
16. Peraturan Wali Kota Nomor 38 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek kewilayahan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun

waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan.

Maksud dari penyusunan Renstra PD Kemantren Mergangsan Tahun 2025 – 2029 adalah memberikan pedoman bagi Kemantren, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penyusunan Renstra PD Kematren Mergangsan Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kematren Mergangsan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kematren Mergangsan untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta 2025 – 2029 adalah :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan Renstra PD Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Renstra PD Kota Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan;
- 4.2. Program Prioritas;
- 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

BAB V PENUTUP

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, pada Pasal 4, Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mantri Pamong Praja dibantu oleh:

1. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja, dipimpin oleh Mantri Anom. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
   b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
   c. membantu Mantri Pamong Praja dalam penkgoordinasian program kegiatan jawatan;
   d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
   e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
   f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
   g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
   h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
   i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
   j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalianinternal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budayapemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
   k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaanpada Sekretariat Kemantren;
   l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
   m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
   o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, danpenyusunan laporan Kemantren; dan
   p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang

dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umumdan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
d. pengelolaan aset Kemantren;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
   c. penatausahaan keuangan Kemantren;
   d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
   e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
   f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
   g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
   h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
   i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;

j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Jawatan Praja, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
   b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
   e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
   f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
   g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
   h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
   i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat kemantren;
   j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
   k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
   l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* dalam rangka kegiatan pemerintahan;

m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
   d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
   e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
   f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
   g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
   h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
   i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
   j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
   m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
   n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
   p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
   q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
   b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
   c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
   e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
   f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
   g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
   h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
   i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
   j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
   k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
   l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
   m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
   n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
   o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
   p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;

r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
   d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
   f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
   g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
   h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
   i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
   k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
   l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
   m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
   n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
   o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
   q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah,

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;

r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
   b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
   e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
   f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
   g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
   i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
   j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
   k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
   l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
   m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
   n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
   o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
   p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
   q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
   r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

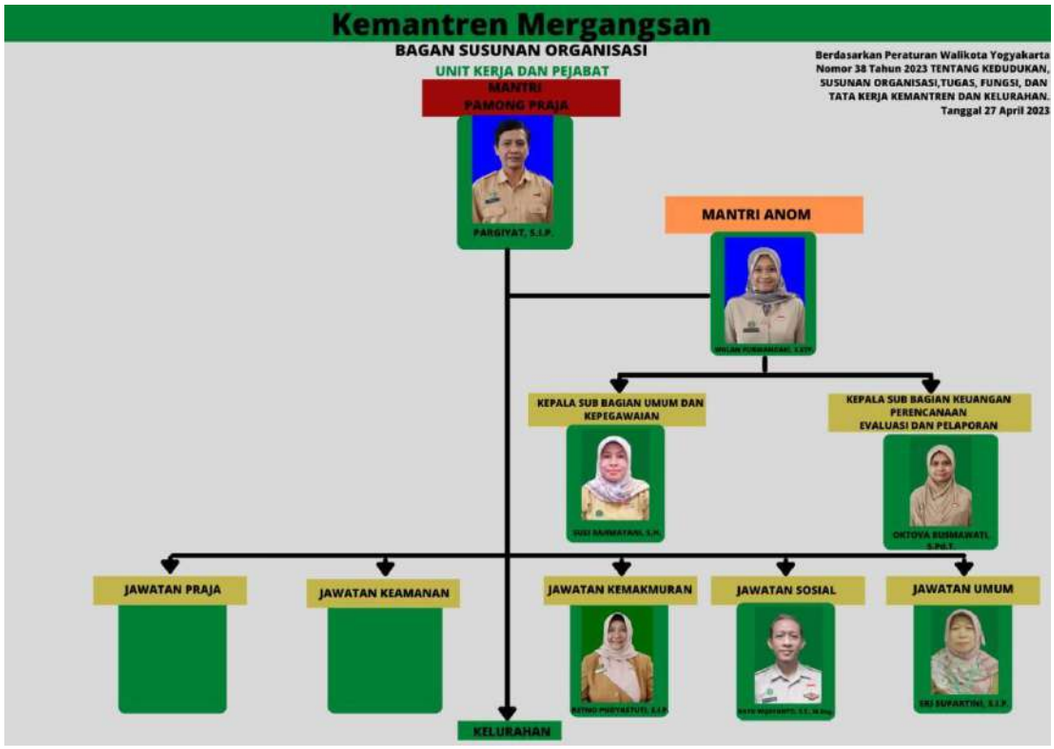

Gambar 2-1 Bagan Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan

Dari bagan Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
3. Masing-masing Jawatan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menunjang ketugasannya, Kematren Mergangsan didukung sumber daya manusia sebanyak 50 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 -1 Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	-	-	-	1	1	-	1
2	Mantri Anom	-	-	-	1	-	1	1
3	Kepala Jawatan	-	-	-	3	1	2	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2	2
5	Jabatan Fungsional Umum Kemantren	-	7	6	-	6	7	13
6	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) /TT Kemantren	-	-	-	-	2	3	5
7	Lurah	-	-	-	3	2	1	3
8	Sekretaris Lurah	-	-	-	3	1	2	3
9	Kepala Seksi Kelurahan	-	-	-	7	4	3	7
10	PPPK	-	-	-	-	-	1	1
11	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) /TT Kelurahan	-	-	-	-	4	2	6
Jumlah :		-	7	6	20	21	24	45

Tabel 2 - 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III / Spama	2	2	-
2	Diklatpim IV / Adum	15	6	9
3	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	2	1	1
	Jumlah	19	9	10

Tabel 2 - 3 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	2	2	-
2	S1/ D4	19	6	13
3	D III	9	5	4
4	SLTA / SMK	3	2	1
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		33	15	18

Tabel 2 - 4 Jumlah Pejabat Struktural Kemantren Mergangsan berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	6	3	3
4	IV B	12	5	7
	Jumlah	20	9	11

2.1.2.2. Sarana Prasarana

Dalam pemenuhan fungsinya di bidang pelayanan, Kemantren Mergangsan memiliki sarana prasara sebagai berikut:

Tabel 2 - 5 Daftar Sarana Prasarana Kemantren Mergangsan

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung Kantor Kemantren	1
2.	Pendopo Kemantren	1
3.	Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1
4.	Gedung Kantor Kelurahan	3
5.	Pendopo Kelurahan	3
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	2
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	2
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	14
9.	Sound System	8
10.	Wireless / Sound System	4
11.	Telepon	22
12.	Telepon 3 digit	4
13.	Laptop	2
14.	Komputer	53
15.	Genset	4
17.	Ruang Rapat	4
18.	AC	8
19.	Almari Kayu	16
20.	Filling Kabinet	12
21.	Lemari Besi	12
22.	Kursi	708
23.	AC	24
24.	Meja	135
25.	TV	6
26.	Tempat kayu	2

27.	Tangga aluminium	5
28.	LCD Proyektor	4
29.	Gergaji / chainsaw	1
30.	Mesin bor	3
31.	Kipas angin	27
32.	Kompor gas	2
33.	Lambang Garuda	4
34.	Megaphone	4
35.	Mesin penghisap debu	1
36.	Mimbar podium	1
37.	Papan nama instansi	2
38.	Papan visual	8
39.	Mesin penyemprot	5
40.	Pompa air	3
41.	Rambu cermin	6
42.	Rambu jalan	32
43.	Scanner	2
44.	Sepeda	2
45.	Sofa	1
46.	Tabung gas	2
47.	Tempat sampah	1
48.	Wireless	4
49.	Tenda UMKM	6

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Mergangsan sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan kewilayahan, mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran perangkat daerah :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan, dan
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaima tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2 - 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Target	390 poin	395 poin	400 poin	400,67 poin	402 poin
			Realisasi	391 poin	395,33 poin	400,33 poin	401,33 poin	400 poin
			Capaian %	100,26	100,08	100,08	100,16	99,50
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Target				A Nilai	A Nilai
			Realisasi				A Nilai	A Nilai
			Capaian %				100	100

Tabel 2 - 7 Capaian Kinerja Program PD Kemantren Mergangsan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/ Program		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan		390 poin	391 poin	100,26	395 poin	400,33 poin	100,08	400 poin	400,33 poin	100,08	400,67 Poin	401,33 Poin	100,17	402 Poin	400 Poin	99,50
1.1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** : Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan		83	83,05	100,06	84	84,15	100,18	85	85,01	100,01	85,5	86	100,58	86	86,05	100,06
1.2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** : Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan		Rp 1.000.000.000	Rp 1.104.590.500	110,46	Rp 1.105.000.000	Rp 1.113.893.600	100,80	Rp 1.110.000.000	Rp 1.591.231.000	143,35	Rp 1.591.231.000	Rp 1.673.571.000	105,17	Rp 1.593.231.000	Rp 2.081.965.000	130,68
1.3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** : Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan					125 pelanggaran	54 pelanggaran	156,8	58 pelanggaran	50 pelanggaran	113,79	65 pelanggaran	40 pelanggaran	138,46	65 pelanggaran	67 pelanggaran	96,92

No	Sasaran Strategis/ Program		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi										100%	100%	100	100%	100%	100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan											A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100
2.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Mergangsan											A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100

Dalam perkembangannya, terjadi beberapa perubahan terkait nomenklatur Program dan Indikatornya sebagai dampak dari tindak lanjut disahkannya beberapa peraturan Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan RPJMD, di awal Renstra tahun 2017 Kemantren Mergangsan memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat dan tingkat Swadaya masyarakat. Pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari disahkannya Permendagri 90 Tahun 2019 terjadi pemecahan program menjadi 3 (tiga) program dan pergantian indikator program yang disempurnakan dengan Kepmendagri 50 tahun 2020 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program angka pelanggaran perda. Mendasarkan pada pemetaan pemutakhiran Kepmendagri 20 Tahun 2020 dan perubahan nomenklatur kecamatan menjadi kemantren terdapat 3 (tiga) kinerja program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, kinerja program pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda dan kinerja program swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator program angka swadaya masyarakat.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, maka sasaran strategis, program, indikator kinerja sasaran dan program menjadi seperti yang terlihat dalam tabel di atas.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemantren Mergangsan memiliki Kelompok Sasaran Layanan antara lain :

1. Masyarakat Kemantren Mergangsan sebagai penerima layanan kewilayahan
2. OPD lainnya. Bisa dipastikan terdapat crosscutting ketugasan antara Kemantren Mergangsan dengan OPD-OPD lainnya di Kota Yogyakarta.
3. Mitra Kemantren Mergangsan dalam pemberian pelayanan
4. Pihak lain yang membutuhkan pelayanan publik di Kemantren Mergangsan, baik itu untuk keperluan Pelayanan Pemakaman, informasi, maupun bidang sosial.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemantren Mergangsan tentu tidak sendiri, Kemantren memiliki mitra kerja antara lain :

1. Polsek Mergangsan sebagai mitra untuk dukungan peningkatan keamanan dan

ketertiban

2. Koramil Mergangsan sebagai mitra untuk dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3. KUA Mergangsan sebagai mitra kerja untuk dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama
4. Puskesmas Mergangsan sebagai mitra kerja untuk dukungan pelayanan kesehatan
5. Semua OPD lain di Pemerintah Kota Yogyakarta

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat hambatan berupa perbedaan pemahaman antara stakeholder Kemantren dengan lembaga sosial masyarakat. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan upaya pendekatan secara intensif baik secara formal maupun informal. Selain itu juga dilaksanakan monitoring secara teknis ke lapangan secara berkala untuk menyelaraskan tujuan pembangunan sehingga pada periode 2025-2029 semua indikator kinerja Kemantren Mergangsan dapat tercapai sesuai target.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 menyebutkan Mantri Pamong Praja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu

strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih belum sesuainya antara beban kerja dengan kemampuan sumber daya manusia pengampu tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa penyelesaian ketugasan menjadi terhambat.
2. Dinamisnya aplikasi-aplikasi terkait dengan pengelolaan keuangan, sedangkan personil yang menangani harus rangkap jabatan.
3. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mantri Pamong Praja.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
5. Belum optimalnya Pengelolaan Makam.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pada kelompok usia produktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Mergangsan.
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari rumah tangga.
8. Belum adanya dukungan / fasilitasi yang bisa digunakan untuk display / promosi pameran produk UMKM seperti adanya booth portable.

2.2.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang ada di Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
      1) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
      2) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengindahkan aturan dan hukum yang berlaku.
      3) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
      4) Murah: karena tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat,

masyarakat hanya melengkapi syarat yang diperlukan saja

5) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya dengan memperhatikan akses keamanan data.
6) Non diskriminatif: tidak adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.

2. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Mergangsan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kematren Mergangsan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

3. Pembangunan titik ungkit perekonomian di kawasan pendidikan dan budaya

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Mergangsan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah melibatkan semua unsur 5K, yakni :

a. Kota
   1) Pemerintah kota/daerah sebagai regulator, pembuat kebijakan, penyedia infrastruktur, dan fasilitator.
   2) Kemantren Mergangsan turut mendukung implementasi Smart City Pemerintah Kota Yogyakarta, ruang publik hijau, tata kelola sampah.
b. Kampung
   1) Basis masyarakat akar rumput, lingkungan permukiman, desa/kelurahan yang jadi ujung tombak implementasi.
   2) Contoh: kampung proklim, bank sampah, KWT.

c. Kampus
    1) Perguruan tinggi/lembaga riset sebagai pusat ilmu, data, inovasi, dan edukasi.
    2) Contoh: riset energi terbarukan, program KKN tematik, pendampingan digitalisasi UMKM.
d. Komunitas
    1) Organisasi masyarakat sipil, LSM, kelompok hobi, atau jaringan relawan yang punya kedekatan langsung dengan warga.
    2) Contoh: komunitas budaya lokal, komunitas cepat tanggap sosial.
e. Korporat
    1) Dunia usaha dan industri yang punya sumber daya finansial, teknologi, dan jaringan pasar.
    2) Contoh: CSR hotel, restoran, toko besar, dan tempat usaha lain di wilayah Kemantren Mergangsan.

Keseriusan Kemantren Mergangsan dalam menggandeng 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Mergangsan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif dalam pola tumata, tumanja dan krasa.

Potensi lokal berupa geliat ekonomi di koridor Taman Siswa dan Prawirotaman sebagai pusat pendidikan dan budaya, serta peluang pariwisata dari limpahan wisatawan Malioboro yang dapat dikembangkan melalui penguatan UMKM belum optimal.

4. Penataan PKL

PKL di Kemantren Mergangsan merupakan salah satu unsur penggerak perekonomian warga di Kemantren Mergangsan. Terbukti dengan jumlahnya yang tidak berkurang malah semakin bertambah di tengah moratorium PKL ini. Dengan demikian perlu adanya penataan dan pembinaan PKL.

Geliat PKL itu sendiri merupakan salah satu potensi yang bisa menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kemantren Mergangsan. Di tengah moratorium yang harus ditegakkan, maka Kemantren Mergangsan mengarahkan PKL di wilayah Kemantren untuk dapat bertransformasi ke bentuk UMKM. Hal ini didukung dengan dibukanya beberapa gelar dan perayaan yang melibatkan UMKM yang masih berada dalam fase rintisan atau pemula.

Namun demikian, pengembangan UMKM Mergangsan melalui pemanfaatan geliat PKL dan potensi ekonomi pendidikan Taman Siswa serta limpasan wisatawan Malioboro belum optimal sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

5. Permasalahan penanganan dan pengolahan sampah

Dengan ditutupnya TPA Piyungan, mau tidak mau masyarakat Kota Yogyakarta harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Sebisa mungkin sampah sudah dikelola dari unsur produsennya, yakni rumah tangga. Kemantren Mergangsan melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sampah melalui lembaga-lembaga yang ada di wilayah Mergangsan.

Tabel 2 - 8 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sinergitas dan peran aktif lembaga masyarakat dalam proses pembangunan	Keterbatasan sarpras, kualitas dan kuantitas SDM di wilayah	Lemahnya koordinasi antar instansi (duplikasi layanan, pemborosan sumber daya)	Tuntutan masyarakat global agar pemerintah makin transparan (open data, open budget)	Akses pelayanan publik di kota besar relatif baik, tapi di daerah terpencil/3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih minim	Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait respon aduan untuk semakin cepat ditindaklanjuti	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Keterlibatan lembaga masyarakat pada proses perencanaan pembangunan	Keterlibatan masyarakat masih belum merata	Kelompok rentan (difabel, perempuan, lansia, masyarakat miskin) sering kesulitan mengakses layanan	Literasi digital & ekonomi hijau berbasis gender perlu diarusutamakan dalam perencanaan	Banyak kementerian/lembaga/daerah belum mengintegrasikan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* dalam perencanaan	Pemda DIY sudah punya *Perda No. 4/2012 tentang Pengarusutamaan Gender*, namun implementasinya di OPD belum merata. PPRG (Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender) belum sepenuhnya masuk ke program prioritas daerah	Pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses perencanaan pembangunan
Potensi koridor Taman Siswa dan Prawirotaman sebagai kawasan pendidikan dan budaya	Bagaimana pengelolaan limbah industri kreatif bisa ramah lingkungan (eco-UMKM)	UMKM dan industri (batik, makanan, kerajinan) masih banyak yang menghasilkan limbah cair/padat tanpa pengolahan memadai	Ekonomi berbasis pariwisata dan konsumsi sangat rentan pada inflasi dan pelemahan daya beli. Perlu diversifikasi (UMKM,	Sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu didorong agar tidak rapuh terhadap guncangan eksternal	DIY tengah menjajaki dua konsep strategis: Ekonomi Biru: memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan (pariwisata bahari, perikanan, bioteknologi kelautan), untuk keseimbangan ekonomi–lingkungan.	Pembangunan titik ungkit perekonomian di kawasan pendidikan dan budaya

serta peluang ekonomi dari arus wisatawan Malioboro yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan UMKM lokal			agroindustri, energi lokal)		Ekonomi Hijau: dalam proses penyusunan peraturan daerah (Rapergub) untuk menjamin pembangunan yang seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan sosial	
Koordinasi dan operasi ketertiban rutin dilaksanakan dalam pengkondisian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penurunan kualitas tata ruang kota, kemacetan, serta konflik penggunaan ruang (antara pejalan kaki, kendaraan, PKL)	Keberadaan PKL sering melebihi kapasitas trotoar, alun-alun, dan ruang publik	Bagaimana kebijakan penataan tetap menjamin keadilan ekonomi untuk kelompok rentan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan	Area PKL yang tidak tertata dapat menimbulkan masalah sanitasi (kurang air bersih, tidak ada pengelolaan limbah, risiko penyakit)	Penumpukan PKL di pusat kota menimbulkan kemacetan, parkir liar, dan meningkatnya emisi kendaraan.	Penataan PKL
Bank sampah sudah aktif dan pembuangan sampah melalui penggerobak	Pemilahan sampah dari rumah tangga belum optimal	Daya tampung lingkungan sudah tidak memadai, menimbulkan konflik sosial dan masalah kesehatan	Pencemaran tanah, sungai, laut, sulit terurai, dan mengganggu ekosistem	Daya tampung lingkungan sudah tidak memadai, menimbulkan konflik sosial dan masalah kesehatan	Pengelolaan sampah berkelanjutan belum menjadi budaya, tanpa perubahan perilaku, kebijakan teknis sulit efektif	Permasalahan penanganan dan pengolahan sampah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029;

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut.

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai III-7 Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam membangun komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita Masyarakat Kota Yogyakarta secara sinergis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu 2025 – 2029.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dari Kemantren Mergangsan adalah Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan, dihitung dengan formula :

80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Desa

dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Nilai ini bisa diambil dari nilai pada SIM Evdeskel.

3.2 Sasaran Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029;

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2029 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3 - 9 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta

Visi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"** **Misi 1 :** Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan **Misi 2 :** Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari **Misi 3 :** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif dan berbudaya berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang produktif, berkualitas unggul dan berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
				Harapan laman Sekolah
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan	Indeks Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Indeks Resiko Bencana (IRB)		
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	PDRB Per Kapita	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan Ekonomi
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Indeks Gini	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat
			Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan
	Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP

Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945 **Misi 5 :** Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	dari korupsi, berkeadaban dan dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kondusivitas daerah	Crime Rate

Sedangkan sasaran strategis dari Kemantren Mergangsan adalah :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan, dihitung dengan formula :
   Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
2. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan yang diperoleh dari Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Tabel 3 - 10 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan											
- Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan		Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan (Poin)	500.80	502.40	502.67	502.93	502.93	503.20	503.20	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan (poin)	400	402	402.33	402.67	402.67	403	403	
		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3 Strategi Kemantren Mergangsan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam

menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3.3.1 Penahapan Pembangunan

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Mergangsan diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. (Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029).

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi: (i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan; (ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik; (iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas; (iv) Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan (v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 11 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

3.3.2 Lokus Renstra Kemantren Mergangsan

Pada periode 2025–2029 ini, Kemantren Mergangsan fokus pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Mergangsan pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 3 - 12 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan perkembangan pembangunan kemantren	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mergangsan	
		Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mergangsan	
		Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- Program/Kegiatan Strategis: Program yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena urgensinya yang tinggi, program ini mendapat prioritas dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Program strategis juga menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
- Program/Kegiatan Operasional: Program yang bersifat teknis dan mendukung implementasi kebijakan strategis. Meskipun cakupannya lebih terbatas, program operasional tetap penting untuk menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam dokumen ini, program strategis dijabarkan secara terperinci pada bab sebelumnya sebagai program prioritas, sedangkan program/kegiatan operasional dijabarkan lebih lanjut pada penjabaran berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahap awal dalam penyusunan program pembangunan daerah dimulai dengan evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup identifikasi permasalahan di seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 – 2029 di Kemantren Mergangsan adalah :

1. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial di Kemantren Mergangsan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
   Program ini dilaksanakan oleh 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
      yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan, terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD.
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
      3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
      7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh 5 jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan.
   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada:
      - Kelurahan Keparakan
      - Kelurahan Wirogunan
      - Kelurahan Brontokusuman.
   4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pada:
      - Kelurahan Keparakan
      - Kelurahan Wirogunan
      - Kelurahan Brontokusuman.

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
5) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nonperizinan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 - 133 Rumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra pada Kemantren Mergangsan Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat - Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan				Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Mergangsan)	Jumlah Laporan Gelar Budaya Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
						2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Mergangsan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
						4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mergangsan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mergangsan		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mergangsan		Nilai Sakip Kemantren Mergangsan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Mergangsan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Mergangsan	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Kemudian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 - 144 Rencana Program / Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Mergangsan				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah Laporan Gelar Budaya Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Kemantren Mergangsan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4	340.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				340.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4	340.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000		
7.01 - KECAMATAN				12.603.951.562		12.689.599.642		12.947.697.689		13.276.334.345		13.637.260.058		14.106.864.560		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.315.174.348		7.078.475.527		7.222.447.028		7.405.766.171		7.607.096.701		7.869.050.117		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mergangsan	Nilai IKM Kemantren Mergangsan (Nilai)	86,05	86,1		86,1	7.078.475.527	86,13	7.222.447.028	86,14	7.405.766.171	86,14	7.607.096.701	86,14	7.869.050.117	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
	Nilai SPIP Kemantren Mergangsan (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur			
	Nilai Sakip Kemantren Mergangsan (Predikat)	A	A		A		A		A		A		A			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.038.000		16.364.202		16.779.556		17.235.719		17.829.238		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	16.038.000	1	16.364.202	1	16.779.556	1	17.235.719	1	17.829.238		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.980.000		2.020.272		2.071.550		2.127.867		2.201.141		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3	1.980.000	3	2.020.272	3	2.071.550	3	2.127.867	3	2.201.141		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.540.000		1.571.323		1.611.206		1.655.007		1.711.998		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.611.206	1	1.655.007	1	1.711.998		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.540.000		1.571.323		1.611.206		1.655.007		1.711.998		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	1.540.000	1	1.571.323	1	1.611.206	1	1.655.007	1	1.711.998		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.155.000		1.178.492		1.208.404		1.241.256		1.283.999		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	1.155.000	1	1.178.492	1	1.208.404	1	1.241.256	1	1.283.999		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.155.000		1.178.492		1.208.404		1.241.256		1.283.999		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	1.155.000	1	1.178.492	1	1.208.404	1	1.241.256	1	1.283.999		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.128.000		7.272.979		7.457.581		7.660.320		7.924.106		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1	7.128.000	1	7.272.979	1	7.457.581	1	7.660.320	1	7.924.106		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.540.000		1.571.321		1.611.205		1.655.006		1.711.997		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12	1.540.000	12	1.571.321	12	1.611.205	12	1.655.006	12	1.711.997		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.337.912.000		5.446.481.593		5.584.723.429		5.736.547.737		5.934.088.051		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35		35	5.337.912.000	35	5.446.481.593	35	5.584.723.429	35	5.736.547.737	35	5.934.088.051		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.330.927.000		5.439.354.522		5.577.415.462		5.729.041.096		5.926.322.915		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	35		35	5.330.927.000	35	5.439.354.522	35	5.577.415.462	35	5.729.041.096	35	5.926.322.915		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						770.000		785.661		805.603		827.504		855.999		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12	770.000	12	785.661	12	805.603	12	827.504	12	855.999		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						385.000		392.831		402.801		413.752		428.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12	385.000	12	392.831	12	402.801	12	413.752	12	428.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						385.000		392.831		402.801		413.752		428.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1	385.000	1	392.831	1	402.801	1	413.752	1	428.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						385.000		392.831		402.801		413.752		428.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1	385.000	1	392.831	1	402.801	1	413.752	1	428.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.620.000		4.713.968		4.833.617		4.965.022		5.135.995		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12	4.620.000	12	4.713.968	12	4.833.617	12	4.965.022	12	5.135.995		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1	440.000	1	448.949	1	460.344	1	472.859	1	489.142		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.650.000		1.683.560		1.726.292		1.773.222		1.834.284		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2	1.650.000	2	1.683.560	2	1.726.292	2	1.773.222	2	1.834.284		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						550.000		561.187		575.431		591.074		611.428		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2	550.000	2	561.187	2	575.431	2	591.074	2	611.428		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						550.000		561.187		575.431		591.074		611.428		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12	550.000	12	561.187	12	575.431	12	591.074	12	611.428		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						550.000		561.186		575.430		591.074		611.428		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2	550.000	2	561.186	2	575.430	2	591.074	2	611.428		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.760.000		1.795.797		1.841.378		1.891.437		1.956.569		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4	1.760.000	4	1.795.797	4	1.841.378	4	1.891.437	4	1.956.569		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12	440.000	12	448.949	12	460.344	12	472.859	12	489.142		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4	440.000	4	448.949	4	460.344	4	472.859	4	489.142		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						880.000		897.899		920.690		945.719		978.285		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1	880.000	1	897.899	1	920.690	1	945.719	1	978.285		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						263.944.378		269.312.832		276.148.492		283.655.767		293.423.567		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Mergangsan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4	263.944.378	4	269.312.832	4	276.148.492	4	283.655.767	4	293.423.567		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.995.300		31.625.724		32.428.444		33.310.032		34.457.076		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4	30.995.300	4	31.625.724	4	32.428.444	4	33.310.032	4	34.457.076		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.614.828		77.152.783		79.111.065		81.261.750		84.060.031		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4	75.614.828	4	77.152.783	4	79.111.065	4	81.261.750	4	84.060.031		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						53.842.900		54.938.029		56.332.458		57.863.893		59.856.459		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4	53.842.900	4	54.938.029	4	56.332.458	4	57.863.893	4	59.856.459		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.331.350		31.968.609		32.780.032		33.671.178		34.830.658		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4	31.331.350	4	31.968.609	4	32.780.032	4	33.671.178	4	34.830.658		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.160.000		73.627.687		75.496.493		77.548.914		80.219.343		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	72.160.000	12	73.627.687	12	75.496.493	12	77.548.914	12	80.219.343		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.633.401		61.866.644		64.436.935		65.161.509		67.405.371		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20		20	60.633.401	20	61.866.644	20	64.436.935	20	65.161.509	20	67.405.371		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.633.401		61.866.644		64.436.935		65.161.509		67.405.371		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20		20	60.633.401	20	61.866.644	20	64.436.935	20	65.161.509	20	67.405.371		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.143.794.000		1.167.058.012		1.196.680.115		1.229.212.636		1.271.541.065		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	1.143.794.000	12	1.167.058.012	12	1.196.680.115	12	1.229.212.636	12	1.271.541.065		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000		3.061.018		3.138.712		3.224.040		3.335.061		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1	3.000.000	1	3.061.018	1	3.138.712	1	3.224.040	1	3.335.061		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						212.460.000		216.781.296		222.283.608		228.326.531		236.189.047		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	212.460.000	12	216.781.296	12	222.283.608	12	228.326.531	12	236.189.047		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						928.334.000		947.215.698		971.257.795		997.662.065		1.032.016.957		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	928.334.000	12	947.215.698	12	971.257.795	12	997.662.065	12	1.032.016.957		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.743.748		257.884.388		263.429.974		271.618.674		280.971.972		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	238	238		238	252.743.748	238	257.884.388	238	263.429.974	238	271.618.674	238	280.971.972		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16		16		16			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	107	107		107		107		107		107		107			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24.240.000		24.733.026		25.360.796		26.050.245		26.947.296		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1	24.240.000	1	24.733.026	1	25.360.796	1	26.050.245	1	26.947.296		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.527.600		90.328.193		92.620.890		95.138.849		98.414.993		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16	88.527.600	16	90.328.193	16	92.620.890	16	95.138.849	16	98.414.993		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						2.000.000		2.040.679		2.092.475		2.149.360		2.223.374		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1	2.000.000	1	2.040.679	1	2.092.475	1	2.149.360	1	2.223.374		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.308.000		51.331.231		52.634.114		54.065.006		55.926.756		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	107	107		107	50.308.000	107	51.331.231	107	52.634.114	107	54.065.006	107	55.926.756		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.528.148		13.803.302		14.153.655		14.538.431		15.039.068		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1	13.528.148	1	13.803.302	1	14.153.655	1	14.538.431	1	15.039.068		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						74.140.000		75.647.957		76.568.044		79.676.783		82.420.485		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	238	238		238	74.140.000	238	75.647.957	238	76.568.044	238	79.676.783	238	82.420.485		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				337.174.300		324.343.500		330.940.432		339.340.316		348.565.501		360.568.493		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mergangsan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	117	117,67		117,67	324.343.500	118	330.940.432	118	339.340.316	118	348.565.501	118	360.568.493	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						216.751.500		221.160.082		226.773.536		232.938.521		240.959.852		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1		1	216.751.500	1	221.160.082	1	226.773.536	1	232.938.521	1	240.959.852		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						216.751.500		221.160.082		226.773.536		232.938.521		240.959.852		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1		1	216.751.500	1	221.160.082	1	226.773.536	1	232.938.521	1	240.959.852		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						107.592.000		109.780.350		112.566.780		115.626.980		119.608.641		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3		3	107.592.000	3	109.780.350	3	112.566.780	3	115.626.980	3	119.608.641		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						11.012.500		11.236.487		11.521.690		11.834.914		12.242.454		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3		3	11.012.500	3	11.236.487	3	11.521.690	3	11.834.914	3	12.242.454		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						96.579.500		98.543.863		101.045.090		103.792.066		107.366.187		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12	96.579.500	12	98.543.863	12	101.045.090	12	103.792.066	12	107.366.187		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.397.504.214		5.142.929.615		5.247.533.395		5.380.725.555		5.527.004.051		5.717.328.645		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	193	191		191	1.715.203.080	191	1.750.089.174	191	1.794.509.693	191	1.843.294.597	191	1.906.769.183	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.715.102.440		4.811.004.499		4.933.116.743		5.067.226.705		5.241.718.682		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	36	36		36	781.430.000	36	797.323.768	36	817.561.329	36	839.787.261	36	868.705.671		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						781.430.000		797.323.768		817.561.329		839.787.261		868.705.671		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	36	36		36	781.430.000	36	797.323.768	36	817.561.329	36	839.787.261	36	868.705.671		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10		10	933.773.080	10	952.765.406	10	976.948.364	10	1.003.507.336	10	1.038.063.512		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						933.773.080		952.765.406		976.948.364		1.003.507.336		1.038.063.512		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10		10	933.773.080	10	952.765.406	10	976.948.364	10	1.003.507.336	10	1.038.063.512		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	193	191		191	1.213.200.700	191	1.237.876.398	191	1.269.296.004	191	1.303.802.635	191	1.348.699.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.715.102.440		4.811.004.499		4.933.116.743		5.067.226.705		5.241.718.682		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	76	76		76	575.423.800	76	587.127.539	76	602.029.928	76	618.396.500	76	639.691.231		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						575.423.800		587.127.539		602.029.928		618.396.500		639.691.231		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	76	76		76	575.423.800	76	587.127.539	76	602.029.928	76	618.396.500	76	639.691.231		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7		7	637.776.900	7	650.748.859	7	667.266.076	7	685.406.135	7	709.008.369		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						637.776.900		650.748.859		667.266.076		685.406.135		709.008.369		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7		7	637.776.900	7	650.748.859	7	667.266.076	7	685.406.135	7	709.008.369		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	193	191		191	1.739.251.660	191	1.774.626.886	191	1.819.670.218	191	1.869.139.127	191	1.933.503.680		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.715.102.440		4.811.004.499		4.933.116.743		5.067.226.705		5.241.718.682		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	36	36		36	1.025.161.600	36	1.046.012.707	36	1.072.562.456	36	1.101.720.759	36	1.139.658.953		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.025.161.600		1.046.012.707		1.072.562.456		1.101.720.759		1.139.658.953		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	36	36		36	1.025.161.600	36	1.046.012.707	36	1.072.562.456	36	1.101.720.759	36	1.139.658.953		
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10		10	714.090.060	10	728.614.179	10	747.107.762	10	767.418.368	10	793.844.727		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						714.090.060		728.614.179		747.107.762		767.418.368		793.844.727		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10		10	714.090.060	10	728.614.179	10	747.107.762	10	767.418.368	10	793.844.727		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	190,67	191		191	475.274.175	191	484.940.937	191	497.249.640	191	510.767.692	191	528.356.182		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.640.000		29.222.519		29.964.241		30.778.838		31.838.719		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	11		11	28.640.000	11	29.222.519	11	29.964.241	11	30.778.838	11	31.838.719		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28.640.000		29.222.519		29.964.241		30.778.838		31.838.719		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	11		11	28.640.000	11	29.222.519	11	29.964.241	11	30.778.838	11	31.838.719		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.715.102.440		4.811.004.499		4.933.116.743		5.067.226.705		5.241.718.682		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3		3	47.447.000	3	48.412.041	3	49.640.828	3	50.990.346	3	52.746.219		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	299	299		299		299		299		299		299			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						43.652.000		44.539.853		45.670.357		46.911.935		48.527.366		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	299	299		299	43.652.000	299	44.539.853	299	45.670.357	299	46.911.935	299	48.527.366		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan						3.795.000		3.872.188		3.970.471		4.078.411		4.218.853		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3		3	3.795.000	3	3.872.188	3	3.970.471	3	4.078.411	3	4.218.853		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						130.232.100		132.880.935		136.253.700		139.957.844		144.777.349		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	299	299		299	130.232.100	299	132.880.935	299	136.253.700	299	139.957.844	299	144.777.349		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						41.560.600		42.405.915		43.482.256		44.664.349		46.202.384		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	299	299		299	41.560.600	299	42.405.915	299	43.482.256	299	44.664.349	299	46.202.384		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						88.671.500		90.475.020		92.771.444		95.293.495		98.574.965		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4		4	88.671.500	4	90.475.020	4	92.771.444	4	95.293.495	4	98.574.965		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						268.955.075		274.425.442		281.390.871		289.040.664		298.993.895		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	60	60		60	268.955.075	60	274.425.442	60	281.390.871	60	289.040.664	60	298.993.895		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	317	317		317		317		317		317		317			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	30		30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	10.779	10.779		10.779		10.779		10.779		10.779		10.779			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	510	510		510		510		510		510		510			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						47.142.000		48.100.837		49.321.726		50.662.569		52.407.155		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	60	60		60	47.142.000	60	48.100.837	60	49.321.726	60	50.662.569	60	52.407.155		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						43.252.575		44.132.304		45.252.464		46.482.681		48.083.331		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	317	317		317	43.252.575	317	44.132.304	317	45.252.464	317	46.482.681	317	48.083.331		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						23.755.500		24.238.671		24.853.894		25.529.563		26.408.684		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	10.779	10.779		10.779	23.755.500	10.779	24.238.671	10.779	24.853.894	10.779	25.529.563	10.779	26.408.684		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*		*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								6.254.680		6.413.436		6.587.789		6.814.642		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	30		30		30	6.254.680	30	6.413.436	30	6.587.789	30	6.814.642		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								151.698.950		155.549.351		159.778.062		165.280.083		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	510	510		510		510	151.698.950	510	155.549.351	510	159.778.062	510	165.280.083		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				52.786.000				49.016.081		50.260.201		51.626.557		53.404.338		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mergangsan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persentase)	100	100		100		100	49.016.081	100	50.260.201	100	51.626.557	100	53.404.338	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								49.016.081		50.260.201		51.626.557		53.404.338		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada								49.016.081		50.260.201		51.626.557		53.404.338		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1		1		1	49.016.081	1	50.260.201	1	51.626.557	1	53.404.338		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						48.039.000		49.016.081		50.260.201		51.626.557		53.404.338		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1		1	48.039.000	1	49.016.081	1	50.260.201	1	51.626.557	1	53.404.338		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				101.712.700		95.812.000		97.760.753		100.242.102		102.967.248		106.512.967		
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100		100	95.812.000	100	97.760.753	100	100.242.102	100	102.967.248	100	106.512.967	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						95.812.000		97.760.753		100.242.102		102.967.248		106.512.967		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	560	560		560	95.812.000	560	97.760.753	560	100.242.102	560	102.967.248	560	106.512.967		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						33.211.000		33.886.490		34.746.592		35.691.200		36.920.241		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	560	560		560	33.211.000	560	33.886.490	560	34.746.592	560	35.691.200	560	36.920.241		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						62.601.000		63.874.263		65.495.510		67.276.048		69.592.726		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12	62.601.000	12	63.874.263	12	65.495.510	12	67.276.048	12	69.592.726		

4. 2 Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
   a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana;
   b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian; dan
   c. Penumbuhan Wirausaha Muda.
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
   a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat;
   b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
   c. Satu Kampung Satu Bidan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
   a. Bela Beli Produk Warga;
   b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
   c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
   a. Revitalisasi Kampung Wisata;
   b. Ekonomi Olahraga; dan
   c. Penguatan akses pendanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
   a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi;
   b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
   c. Perlindungan Hukum bagi Warga.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:
   a. Bapak Asuh Keluarga Miskin;
   b. Kampung Layak Huni; dan
   c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:

a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
d. Memperkokoh pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Brontokusuman untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
   a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
   b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
   c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Kemantren Mergangsan memang bukan OPD Penanggungjawab Program Prioritas Wali Kota Yogyakarta, namum Kemantren Mergangsan adalah salah satu OPD yang menjadi pendukung dari Program Prioritas Wali Kota tersebut. Berikut Program Prioritas yang menjadi dukungan Kemantren Mergangsan yang tertuang dalam Renstra 2025 – 2029 dan dalam RPJMD 2025-2029:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kemudian dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan juga dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang adaptif.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, kemudian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keparakan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keparakan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirogunan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirogunan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Brontokusuman dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Brontokusuman.

Kemudian dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, selanjutnya dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat dan Program Pemajuan Ekonomi Kreatif.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Jogja Tangguh Bencana.

Program prioritas yang ada di Kemantren Mergangsan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 - 155 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan				
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mergangsan	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Keparakan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mergangsan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 tetap berlaku.

IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Kemudian indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

IKU Kemantren Mergangsan dengan baseline Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 - 16 *Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Yogyakarta*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.12.0000 - Kemantren Mergangsan									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan	Poin	500,8	502,4	502,67	502,93	502,93	503,2	503,2	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	
4.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	poin	400	402	402,33	402,67	402,67	403	403	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Mergangsan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kemantren Mergangsan pada kurun waktu lima (5) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para stakeholder pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Mergangsan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Mergangsan.

KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN UMBULHARJO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA) KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemantren Umbulharjo dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi pelaksanaan program serta kegiatan Kemantren Umbulharjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD Kota. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini dirancang secara sistematis, partisipatif, dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, isu strategis wilayah, serta tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, namun juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kinerja kelembagaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, mulai dari tahapan persiapan, perumusan, hingga finalisasi dokumen.

Semoga dokumen *Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Tahun 2025–2029* ini dapat menjadi acuan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 197305241992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 9

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Umbulharjo 14

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 38

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.2.2. Identifikasi Isu-isu Strategis 47

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 60

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 60

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 61

3.3. Strategi Kemantren Umbulharjo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 65

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Umbulharjo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 74

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 78

4.1. Uraian Program 79

4.2. Uraian Kegiatan 81

4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu indikatif 86

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 89

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Umbulharjo 93

BAB V PENUTUP 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Jabatan Kemantren Umbulharjo 20

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Umbulharjo 26

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Layanan Daerah 28

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 28

Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan 39

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 58

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo 64

Tabel 3.1b Tujuan, Sasaran dan Strategi Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 66

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kemantren Umbulharjo 67

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 75

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Umbulharjo 87

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 88

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 92

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren 17

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan 18

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Pegawai keadaan Desember 2024 Kemantren Umbulharjo berdasarkan pemenuhan Analisis Jabatan 24

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 25

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kemantren Umbulharjo 63

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kemantren Umbulharjo 63

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Umbulharjo 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal melalui program dan kegiatan yang sistematik, terstruktur, dan terukur. Dari permasalahan tersebut, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD menjadi hal yang sangat strategis sebagai acuan bagi kegiatan dan program OPD di seluruh periode serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyusunan RENSTRA OPD dipengaruhi oleh aspirasi kebutuhan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta penyampaian pelayanan publik yang berkualitas. Dinamika kebutuhan dan tantangan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan RENSTRA OPD sebagai alat penting untuk menyesuaikan kebijakan dan program. Hal ini memungkinkan program-program tersebut tetap fleksibel dan sejalan dengan prioritas pembangunan yang terus berubah. RENSTRA OPD juga sebagai alat evaluatif (mengetahui) capaian kinerja dan sebagai landasan perencanaan anggaran tahunan.

Penyusunan RENSTRA OPD ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antar berbagai unit kerja dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kota tentang RPJMD kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan wakil Wali Kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo selama empat tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kemantren Umbulharjo yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo .

   Tahap ini dilakukan dengan:

   a) Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kemantren Umbulharjo dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural.
   b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kemantren ,
   c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
   d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kemantren Umbulharjo yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : 100.3.4/1561 tanggal 22 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo menjadi rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo disusun dengan sistematika:

    I. PENDAHULUAN;
    II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
    III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
    IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
    V. PENUTUP.

5. Rancangan akhir Renstra Kemantren Umbulharjo disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kemantren Umbulharjo untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hubungan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah bahwa RPJMD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Dikatakan bersifat indikatif adalah karena data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH

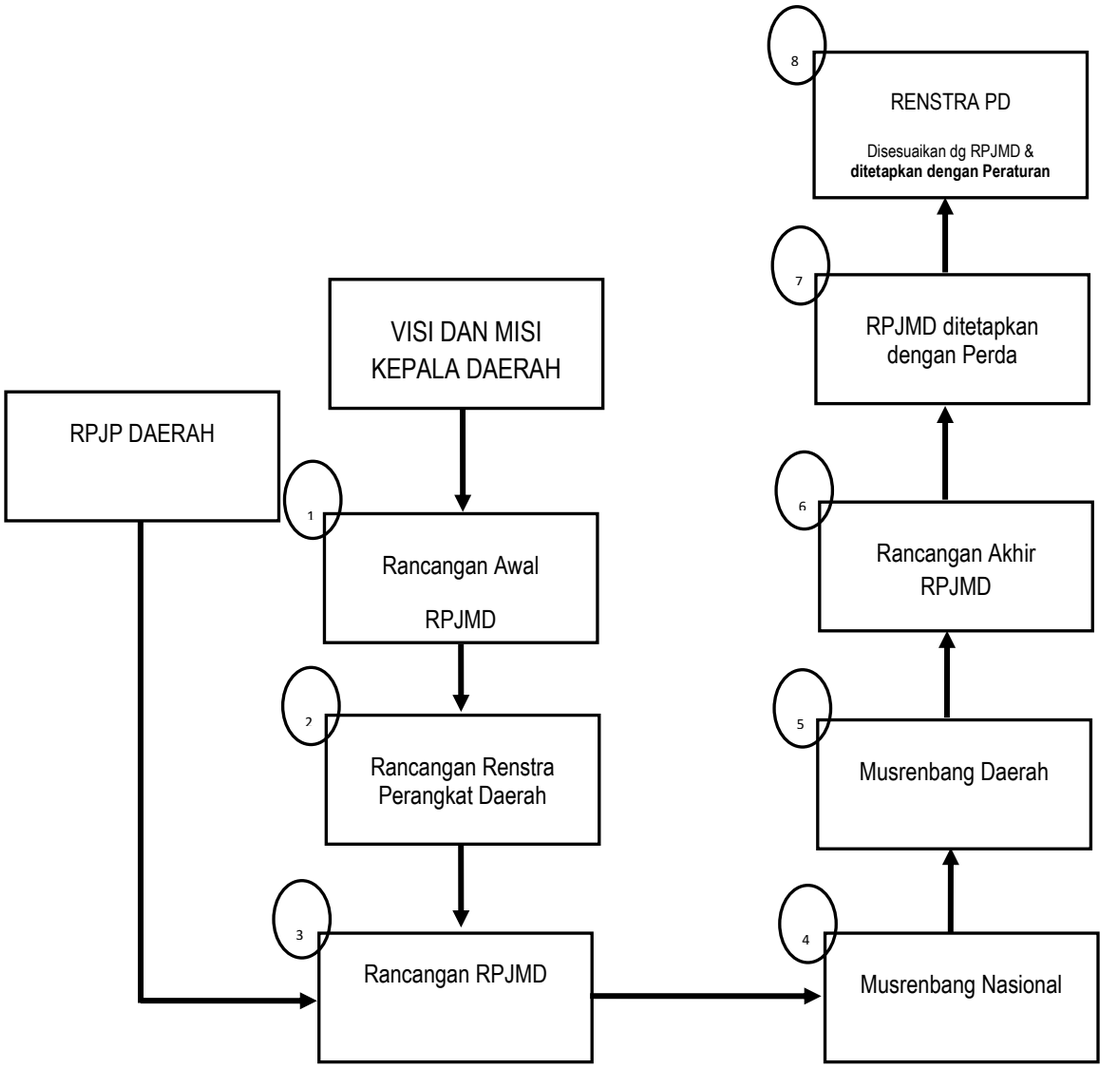

Selain itu dalam penyusunan rencana strategis Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 harus memperhatikan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : 100.3.4/1561 tanggal 22 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunannya harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.
8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 51)
16. Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
17. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek unsur urusan kewilayahan yang diampu oleh Kemantren Umbulharjo dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kemantren Umbulharjo dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.
7. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangka Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program

4.2 Uraian kegiatan

4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang dilaksanakan oleh OPD mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan administratif, pelayanan sosial, hingga pelayanan teknis yang mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, OPD berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi pelayanan. Setiap jenis layanan dikembangkan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Pelayanan OPD juga terus diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi, guna mempercepat proses, meningkatkan keterjangkauan, serta memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, OPD juga terus melakukan evaluasi dan inovasi layanan dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi publik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan ini, OPD berupaya membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui pelayanan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, OPD berkomitmen untuk menjadi motor penggerak utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo terdiri dari beberapa poin antara lain memuat :

1) Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;
2) Sumber daya Perangkat Daerah;
3) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
4) Kelompok sasaran layanan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Umbulharjo

Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Kemantren, sebagai perangkat daerah yang berada di wilayah administratif kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota, memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat lokal. Kemantren bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, serta koordinasi antarinstansi di wilayahnya.

Rincian tugas Kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan, kedudukan Kemantren Umbulharjo berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja.

Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemantren mempunyai fungsi yaitu :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan
b. keistimewaan pada tingkat Kemantren;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kemantren;

e. penyelenggaraan kegiata ketentraman dan ketertiban di tingkat kemantren;

f. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat kemantren;

g. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kemantren

h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat kemantren;

i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat kemantren;

j. penerbitan dokumen perizinan dan/ atau dokumen perizinan sesuai kewenangan kemantren ;

k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat kemantren;

l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

n. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

o. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

p. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;

q. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

s. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

t. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Mantri Pamong Praja adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kemantren yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yoyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi:

a. urusan pemerintahan umum
b. urusan pendidikan
c. urusan kesehatan
d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. urusan sosial
g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
h. urusan pertanahan
i. urusan lingkungan hidup
j. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
k. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
l. urusan perhubungan
m. urusan kebudayaan
n. urusan perpustakaan

Adapun Struktur Organisasi Kemantren Umbulharjo berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 terdiri atas:

a. Mantri Pamong Praja;
b. Mantri Anom
c. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
d. Jawatan Praja;
e. Jawatan Keamanan;
f. Jawatan Kemakmuran;
g. Jawatan Sosial;
h. Jawatan Umum; dan
i. kelompok jabatan fungsional.
j. Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Umbulharjo mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut.

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN KELURAHAN.

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN

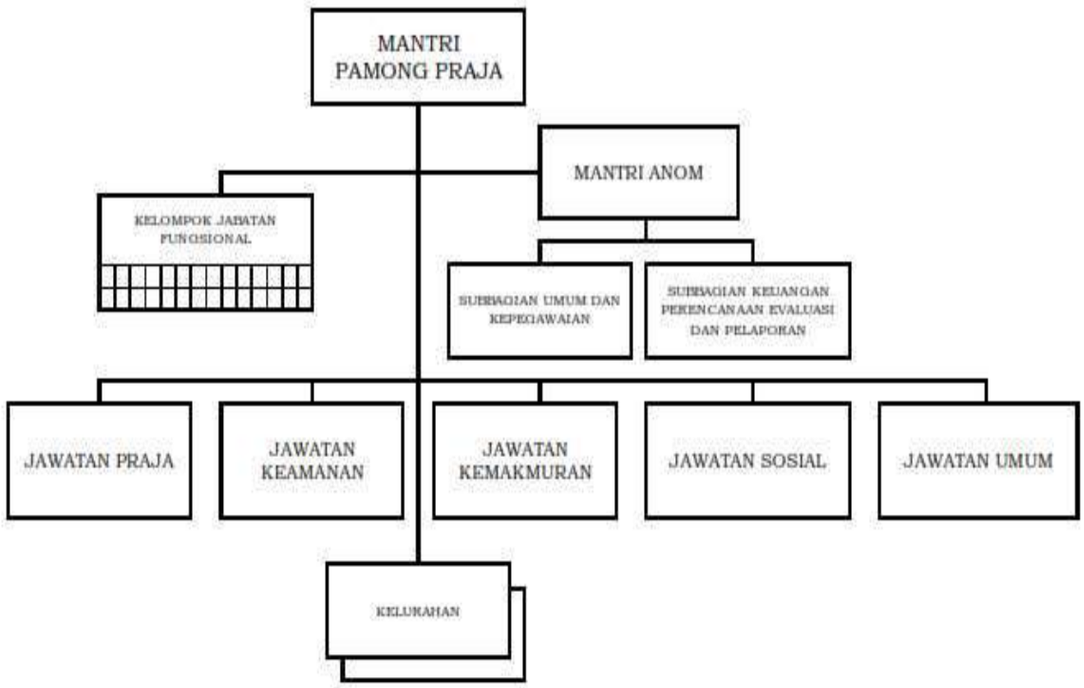

Struktur Organisasi Kelurahan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kemantren berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 terdiri atas:

a. Lurah;
b. Sekretariat Kelurahan:
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f. kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelurahan mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut.

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN KELURAHAN.

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

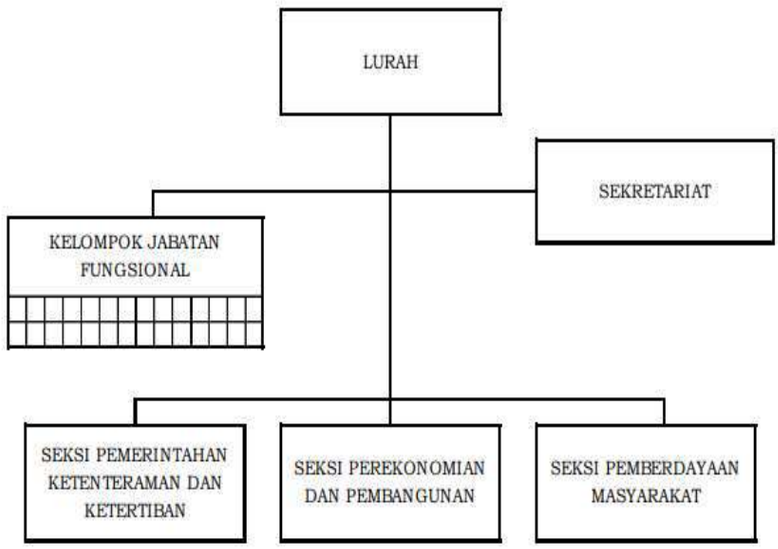

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, maupun teknologi. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi faktor kunci untuk mencapai efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sumber daya manusia OPD terdiri dari aparatur dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi yang terus dikembangkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat.

Dari sisi sarana dan prasarana, OPD didukung dengan fasilitas perkantoran, peralatan kerja, serta teknologi informasi yang terus diupayakan pemutakhiran dan

pemeliharaannya, guna menunjang kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Akses terhadap infrastruktur yang memadai menjadi bagian penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas.

Sementara itu, sumber daya keuangan dikelola melalui anggaran yang dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. OPD berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja dan prioritas pembangunan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat sumber daya OPD, melalui digitalisasi layanan, pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan literasi digital aparatur. Dengan optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, OPD berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara (ASN), memegang peran strategis sebagai pelaksana utama dalam administrasi dan implementasi kegiatan pembangunan wilayah. Dalam konteks pemerintahan daerah, ASN tidak hanya bertugas menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mewujudkan program-program prioritas daerah. Oleh karena itu, keberadaan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan menjadi kebutuhan mutlak agar proses pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk itu, daya dukung aparatur harus diarahkan pada kemampuan memahami, menginterpretasikan, serta mengimplementasikan visi dan misi Wali Kota yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program daerah dapat dijalankan secara optimal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan etos kerja menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan perangkat daerah dalam mengemban amanah pembangunan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan telah memetakan nama dan klasifikasi jabatan yang memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemantren dan kelurahan, tentunya agar hasil kinerja perangkat daerah menjadi optimal. Berikut ini tabel ketersediaan aparatur dan analisis jabatan yang ada :

Tabel 2.1 Analisis Jabatan Kemantren Umbulharjo

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
A	Jabatan Administrator dan Pengawas						
1	Mantri Pamong Praja	1	S1/S2	0	-	-	-
2	Mantri Anom	1	S1/S2	1	S2	-	1
3	Kepala Jawatan Praja	1	S1/S2	1	S2	-	1
4	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	S1/S2	1	S2	-	1
5	Kepala Jawatan Sosial	1	S1/S2	1	S1		1
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	S1/S2	1	S2	1	-
7	Kepala Jawatan Umum	1	S1/S2	1	S1	-	1
8	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1/S2	1	S2	1	
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1/S2	1	S2	-	1
B	Jabatan Fungsional Umum						
1	Bendahara	1	D3	1	S1	1	-

2	Pengelola Akutansi	1	D3	1	S1	-	1
3	Analis Perencanaan Evaluasi danj Pelaporan	1	S1	1	S1	-	1
4	Pengolah Data Laporan Kas	1	D3	0	-	-	-
5	Verifikator Keuangan	2	D3	1	D3	1	-
6	Pengadministrasi Umum	1	SLTA/D1/D2/D3	0	-	-	-
7	Pengadministrasi Kepegawaian	1	SLTA/D1/D2/D3	0	-	-	-
8	Pramu Kebersihan	1	SLTA/D1/D2/D3	0	-	-	-
9	Petugas Keamanan	6	SLTA/D1/D2/D3	0	-	-	-
10	Pengelola Teknologi Informasi	1	D3	0	-	-	-
11	Pengadmistrasi sarana dan prasarana	1	SLTA/D1/D2/D3	0	-	-	-
12	Analis Keamanan	1	S1/D4	0	-	-	-
13	Pengelola keamanan dan ketertiban	2	D3	0	-	-	-
14	Analis Pembangunan	1	S1/D4	1	S1	1	-
15	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	2	D3	0	-	-	-

16	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	3	D3	1	SLTA	-	1
17	Analis Pemberdayaan Masyarakat	1	S1/D4	1	S1	-	1
18	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	D3	0	-	-	-
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1	D3	1	D3	-	1
20	Analis Dokumen Perizinan	1	S1/D4	1	S1	-	1
21	Pengelola dokumen Perizinan	1	D3	1	D3	-	1
22	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	D3	0	-	-	-
23	Analis Pemerintahan Daerah	1	S1/D4	0	-	-	-
24	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	1	D3	1	S1	-	1
	JUMLAH	43		19		5	14

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
A	Jabatan Administrator dan Pengawas						
1	Lurah	7	S1/S2	5	D3, S1, S2	5	1
2	Sekretaris Kelurahan	7	D3/S1	7	S1	6	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	7	D3/S1	7	D3, S1	7	-
4	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	7	D3/S1	3	D3, S1	-	3
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	7	D3/S1	6	D3, S1, S2	1	5
B	Jabatan Pelaksanana						
1	Bendahara	7	D3	0	-	-	-
2	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	7		0	-	-	-
3	Pengadministrasi Umum	7		0	-	-	-
4	Pengadministrasi Keuangan	14		0	-	-	-

5	Pramu Kebersihan	7		0	-	-	-
6	Petugas Keamanan	7		0	-	-	-
	JUMLAH	84		28	-	18	10

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Pegawai keadaan Desember 2024 Kemantren Umbulharjo berdasarkan pemenuhan Analisis Jabatan

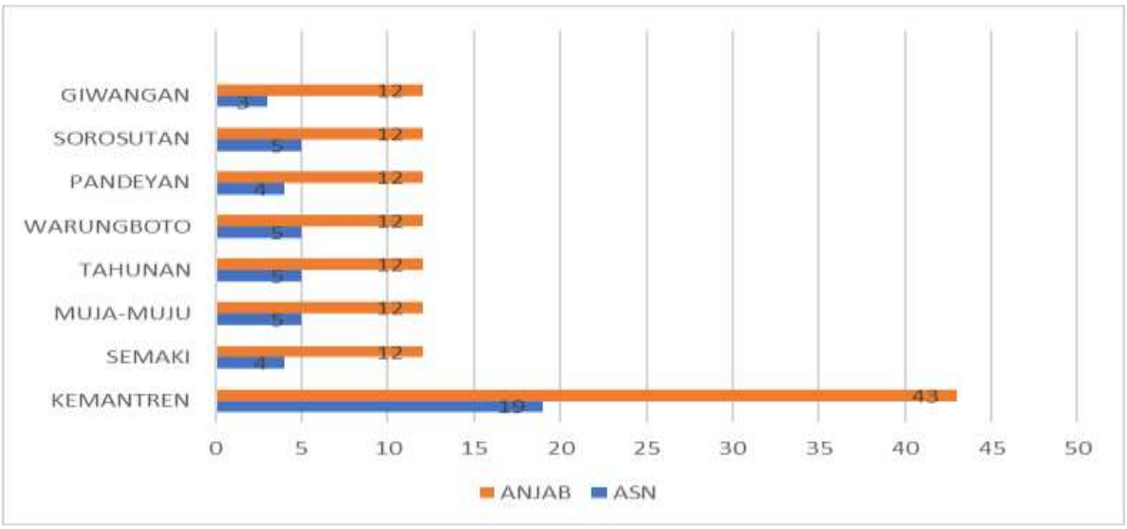

Data tabel di atas dapat disampaikan bahwa pada kelurahan prosentase keterisian analisis jabatan sebesar 36,90%, sedangkan di kemantren sebesar 44,19%, yang kemudian dapat disampaikan pula bahwa kekurangan tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat realisasi capaian program dan kegiatan perangka daerah.

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

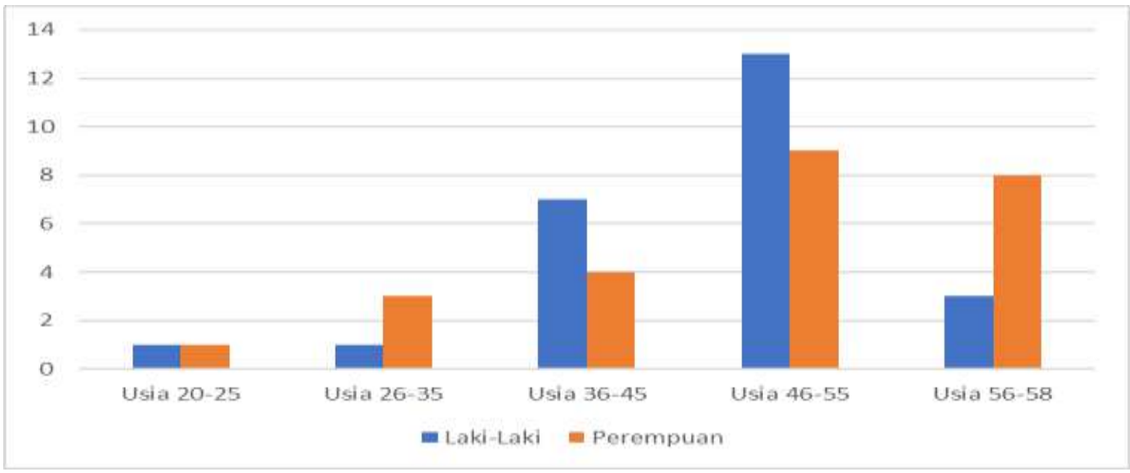

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai di Kemantren Umbulharjo pada tahun 2024 terlihat seimbang. Sehingga dari sudut pandang gender, sumber daya di Kemantren Umbulharjo sudah terpenuhi. Sedangkan dari sudut pandang produktifitas berdasarkan usia, jumlah terbanyak berada pada kisaran usia 46-55 tahun dengan prosentase 41,52%. Pada usia 46-55 tahun sebenarnya produktifitas akan cenderung mengalami penurunan, dikarenakan mereka sudah memasuki masa kerja yang rata-rata sudah mencapai 20 tahun. Namun demikian Karena tuntutan kewajiban dari ikatan kedinasan, maka produktifitas tetap harus dibangun sebagai modal utama pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran perangkat daerah.

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung di kemantren dan kelurahan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kemantren yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Umbulharjo .

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Umbulharjo

SARPRAS	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
		Lengkap	Cukup	Kurang	
Gedung utama	8 unit	√			
Gedung pendukung	3 unit	√			Pendopo, rumah dinas MPP dan mushola
Sarana pendukung gedung	2 unit		√		• Tempat parkir pelayanan masih belum beratap. • Ruang Merokok • Kamar mandi luar
Ruang pelayanan	8 ruang	√			Termasuk ruang bermain anak
Ruang rapat	8 ruang		√		Masih kurang penataan
Ruang laktasi	8 ruang	√			
Ruang perpustakaan	8 ruang		√		
Ruang arsip	2 ruang		√		Masih kurang sarpras pendukung
Ruang kerja	8 ruang		√		
Komputer dan printer			√		Beberapa sudah mulai tidak mendukung spesifikasinya
Meja dan kursi kerja			√		
Kendaraan dinas roda 4	1 unit	√			Baru

Kendaraan operasional ketertiban	1 unit		√		Limpahan dari Dinas Ketertiban
Kendaraan dinas roda 2	24		√		Kendaraan sesuai dengan struktural yang berhak menerima
Kendaraan operasional roda 3	1 unit		√		1 Operasional

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Umbulharjo merupakan perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Guna mendukung urusan tersebut maka ditetapkan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Kemantren Umbulharjo adalah meningkatnya tingkat perkembangan dan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan indikator kinerja sasaran yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo. Indikator kinerja sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kemantren Umbulharjo.

Untuk mendukung tercapainya mencapai sasaran strategis tersebut di atas maka disusunlah 5 program sebagai berikut :

1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kelima program tersebut memiliki sasaran program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Layanan Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Satuan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Poin	380,5	382,14	381	382,28	382,5	383,14	388,43	388,43	388,43	388,57
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Poin	81	82,01	81,5	82,39	83	83,13	83,13	86,02	86,02	86,06
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Rupiah	1.101.518.000	2.798.213.500	1.982.273.000	2.439.904.850	2.203.036.000	3.851.194.259	-	-	-	-
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Rupiah							3.851.825.200	3.852.570.378	3.851.825.200	3.852.141.395
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Pelanggaran			144	66	72	51	51	51	51	51

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Satuan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persen	-	-	-	-	-	-	76	100	100	100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Nilai			A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Dari tabel 2.3 diketahui berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja OPD maupun pelaksanaan kinerja program sebagai berikut :

a. Untuk Indikator Kinerja OPD " Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo" , faktor pendorongnya antara lain :
    1) Penentuan sasaran dan target yang tepat dalam Renstra Kemantren Umbulharjo
    2) Penentuan indikator kinerja yang tepat terhadap sasaran dan target
    3) Respon yang cepat terhadap isu-isu strategis
    4) Penentuan strategi melalui program dan kegiatan yang fokus pada potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat
    5) Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan
    6) Membangun kemitraan antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, perusahaan melalui CSR
    7) Sudah ada evaluasi terkait dengan penilaian mandiri penilaian evaluasi kelurahan.
    8) Inovasi di Kemantren dan Kelurahan yang mendukung penyelesaian permasalahan di wilayah.

    Sedangkan faktor penghambat capaian indikator kinerja OPD ini adalah :
    1) Terbatasnya lingkup kewenangan kemantren, sehingga tidak semua kegiatan yang menjadi usulan wilayah dapat dikawal langsung oleh kelurahan atau kemantren.
    2) Managemen sumber daya potensi di wilayah belum optimal dimanfaatkan dan masih terdapat egosektoral yang berpotensi menjadi konflik antar wilayah dalam satu kelurahan.
    3) Branding atau tematik belum optimal digunakan pada saat mengusulkan kegiatan
    4) Pemahaman dalam melakukan penilaian mandiri evaluasi kelurahan belum sama sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan masing-masing kelurahan.
    5) Belum semua kelurahan melakukan pengelolaan data dukung dengan baik.
    6) Belum semua kelurahan memiliki SDM pengelola data yang menguasai IT.

b. Untuk Indikator Kinerja OPD " Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat" , faktor pendorongnya antara lain :
    1) Kemudahan untuk berkoordinasi/berkonsultasi ke Inspektorat dan Bagian Organisasi
    2) Adanya SOP untuk Sekretariat terkait Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian serta Standar Pelayanan (SP) di Jawatan Umum
    3) Adanya motivasi dari pimpinan dalam kesempatan rapat dinas dan rapat pertemuan dengan perangkat kemantren dan kelurahan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah sulit untuk melengkapi data dukung walaupun sudah berupaya sejak awal tahun untuk mengadminitrasikan kegiatan yang sudah berjalan. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi faktor penghambat ini adalah dengan berusaha untuk menyiapkan data dukung dari awal tahun , optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang sudah ada serta dengan mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

c. Untuk Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo", faktor pendukungnya antara lain :
    1) Komitmen dari pimpinan dengan maklumat pelayanan, yang juga merupakan komitmen dari pengampu pelayanan kelurahan dan kemantren untu memberikan layanan sesuai operasional dan prosedur.
    2) Keaktifan dalam evaluasi SOP dan SPP berkala terkait pelayanan masyarakat.
    3) Koordinasi dan evaluasi secara rutin internal (komunikasi melalui media social, seperti nomor Whatsapp Pelayanan) petugas pelayanan kelurahan dan kemantren, serta koordinasi dalam lingkup sebenarnya .
    4) Selalu berupaya memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan layanan, melalui kegiatan workshop dan sosialisasi
    5) Mengikutsertakan stakeholder Tim Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan review Standar Pelayanan Publik (Ketua RT dan Ketua RW)
    6) Survey dilakukan menggunakan teknologi informasi dan tembahan responden 250. Survey dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun. Nilai 86,06 merupakan hasil evaluasi hingga bulan September.

    Sedangkan hasil capaian ini belum optimal karena beberapa faktor pengambat yaitu :
    1) Perubahan kriteria respon aduan yang menyebutkan respon kurang optimal apabila respon penerimaan aduan lebih dari 24 jam. Dari Kominfo ada informasi untuk penilaian respon penerimaan aduan karena mengalami kendala untuk koordinasi dan informasi yang lebih lengkap.
    2) Tindaklanjutnya: menggunakan WA grup untuk berkoordinasi dan mencari informasi yang lebih lengkap.
    3) Kebutuhan layanan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan jenis/produk layanan kemantren/kelurahan.

    Tindaklanjutnya: Konsultasi publik, menelpon untuk melengkapi dan mengedukasi untuk layanan.

d. Untuk Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan " Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo" , faktor pendorongnya antara lain :

1) Komitmen yang tinggi dari Kelurahan untuk menghimpun data kegiatan yang menggunakan dana swadaya masyarakat.
2) Kegiatan kemasyarakatan sudah normal kembali, sehingga partisipasi masyarakat relatif tinggi.
3) Pelaksanaan Kegiatan kerja bakti, ronda, jimpitan, posyandu, Arisan Bapak2/Ibu2, PKK, HUT RI dan HUT Kota mendukung swadaya masyarakat.
4) Adanya forum atau lembaga sehingga mudah menjalankan kegiatan sesuai program swadaya masyarakat;
5) Partisipasi masyarakat dalam berswadaya di tahun 2023 dan 2024 relatif tinggi.

Disisi lain terdapat juga faktor penghampat dari capaian program ini antara lain :

1) Belum semua lembaga masyarakat melaporkan kegiatannya sehingga dilakukan antisipasi dengan adanya kader pendataan di masing-masing wilayah.
2) Belum ada panduan sebagai dasar penyamaan variabel jenis kegiatan swadaya masyarakat di tingkat kota, sehingga masih menggunakan persepsi masing-masing.
3) Apabila tidak diminta, warga masyarakat tidak menginformasikan data angka swadaya masyarakat kepada kelurahan.

Tindaklanjut dari faktor penghambat ini antara lain Kelurahan melakukan inventarisasi data dari RT dan RW pada saat pertemuan.

e. Untuk Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum " Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo" , faktor pendorongnya antara lain :

1) Terpenuhinya sarana dan prasarana, seperti mobil operasional BKO.
2) Melakukan pendekatan secara persuasif terkait dengan kebersihan. (Patroli secara rutin dan laporan dari warga) Pendekatan untuk PKL patroli satu kali sehari.
3) Melakukan operasi ketertiban secara rutin bersama dengan BKO dan Linmas.
4) Adanya Penyuluhan Pembinaan Ketertiban Pedagang Kaki Lima.
5) Mengindentifikasi sampah visual atau yang berkaitan dengan pilkada.
6) Mensosialisasikan pemilahan sampah dan jadwal pengambilan sampah di Depo.

Sedangkan faktor penghambatnya dari capaian indikator program ini antara lain:

1) Wilayah kemantren yang paling luas diantara 14 Kemantren
2) Cuaca yang tidak menentu menyebabkan pelaksanaan penegakan perda menjadi terhambat
3) Adanya pelanggaran sampah visual yang berulang masih menjadi penghambat dan yang paling banyak. Tindaklanjutnya melakukan pendekatan secara persuasif diberikan edukasi dan himbauan. Apabila tidak berhasil bekerjasama dengan satpol PP Kota melibatkan jawatan keamanan dan BKO.

f. Untuk Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum " Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi " , faktor pendorongnya antara lain :
   1) Adanya koordinasi dan komunikasi intensif antara Kemantren Umbulharjo dengan stakeholder. Koordinasi terkait dengan permasalahan diwilayah dilaksanakan tidak hanya melalui rapat resmi namun juga dilaksanakan melalui WA Group Forkompimtren.
   2) Adanya koordinasi Kemantren dengan Forkompimtren terkait persiapan dan pengamanan kegiatan di wilayah Kemantren Umbulharjo, berupa kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat serta koordinasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2024 serta Pemilukada Walikota Tahun 2024.
   3) Adanya Koordinasi Kemantren dengan Forkompimtren dalam menyelesaikan permasalahan utama di tahun 2023 seperti stunting, pelaksanaan PIN Polio, pelaksanaan Upacara Hut RI, Pelaksanaan untuk netralitas Pilkada dan pengelolaan sampah diwilayah.
   4) Koordinasi secara tatap muka minimal dilaksanakan 1 kali setiap triwulan.

   Selain faktor pendorong diatas ada faktor penghambatnya dari capaian indikator program ini antara lain Kemantren Umbulharjo memliliki wilayah yang luas di antara 14 Kemantren di Kota Yogyakarta.

g. Untuk Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota " Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo" , faktor pendorongnya antara lain :

   1) Adanya tindak lanjut dari arahan Inspektorat terkait dengan perbaikan penyusunan data LKIP Kemantren Umbulharjo pada tahun 2022 dan 2023 yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan 2024, sehingga penyusunan LKIP Kemantren Umbulharjo tahun 2023 dan 2024 dapat tersajikan secara maksimal;

2) Adanya koordinasi internal Kemantren Umbulharjo yang rutin dilaksanakan dan didokumentasikan sebagai salah satu bukti data dukung yang diminta dalam penyusunan LKIP;
3) Pengelolaan website dilakukan di Jawatan Umum. Updating dilakukan secara berkala;.
4) Dukungan dan kerjasama dari seluruh perangkat Kemantren Umbulharjo baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan serta didukung juga oleh semua lembaga dan warga masyarakat Kemantren Umbulharjo.

Faktor penghambat dari capaian indikator program ini antara lain karena belum meratanya kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi padahal hal ini perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan website OPD Kemantren Umbulharjo dan Kelurahan sehingga lebih menarik dan informatif.

Kelompok Sasaran Layanan

Kemantren Umbulharjo sebagai salah satu kemantren strategis di wilayah Kota Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah yang urban, dinamis, dan heterogen. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, keberadaan pusat-pusat pendidikan tinggi, perkantoran, serta aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, Kemantren Umbulharjo menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks tersebut, identifikasi dan pemetaan kelompok sasaran layanan menjadi kunci utama dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan.

Berbagai kelompok masyarakat di Kemantren Umbulharjo memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Adapun kelompok sasaran layanan utama Kemantren Umbulharjo meliputi:

1) Ibu Hamil, Balita, dan Remaja
   Sebagai wilayah padat penduduk dengan banyak keluarga muda, Kemantren Umbulharjo memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi, pemantauan gizi, dan edukasi kesehatan reproduksi remaja.
2) Lansia
   Dengan meningkatnya angka harapan hidup, kelompok lansia menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan preventif, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan penyediaan ruang ekspresi yang ramah usia.
3) Pelaku UMKM dan Pedagang Kecil
   Sebagai bagian penting penggerak ekonomi lokal, pelaku UMKM dan pedagang kecil di wilayah seperti Pasar Giwangan dan sekitarnya menjadi sasaran penguatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, digitalisasi usaha, dan fasilitasi perizinan.
4) Mahasiswa dan Pemuda

Letak geografis Kemantren Umbulharjo yang menjadi lokasi berbagai kampus (seperti UIN Sunan Kalijaga, UAD, dan lainnya) menjadikan kelompok mahasiswa dan pemuda sebagai sasaran strategis pembinaan kepemudaan, kewirausahaan muda, dan pengembangan partisipasi aktif dalam pembangunan.

5) Perempuan dan Anak
   Kemantren Umbulharjo secara konsisten mengembangkan program perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, serta penguatan peran keluarga dalam pencegahan kekerasan dan pengasuhan positif.
6) Penyandang Disabilitas
   Dengan semangat kota inklusi yang digaungkan Kota Yogyakarta, kelompok disabilitas menjadi bagian integral dari sasaran pelayanan, baik dalam aksesibilitas fisik layanan publik, informasi, maupun partisipasi dalam musyawarah pembangunan.
7) Masyarakat Miskin dan Rentan
   Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta akses pada program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Melalui pendekatan berbasis kelompok sasaran, Kemantren Umbulharjo berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan publik yang tepat guna dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masing-masing kelompok sasaran akan menjadi landasan dalam menyusun program, kegiatan, serta inovasi pelayanan yang mendukung terwujudnya Kemantren Umbulharjo yang berdaya, inklusif, dan sejahtera.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2025-2029 dan Kemantren Umbulharjo akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kemantren Umbulharjo ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi. Sementara itu dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan masyarakat pun semakin beragam tentunya memerlukan fasilitasi yang efektif dan efisien.

2. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.

3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pegawai Kemantren dan Kelurahan, diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif pula.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan aparatur terhadap penguasaan tehnologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Selain itu juga perlu upaya peningkatan keprofesionalan pegawai dan sarana pelayanan sehingga menjadi pelayanan menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan

2. Penyusunan atau pembaharuan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.

3. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

4. Peningkatan peran Lembaga masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membangun fungsi masyarakat di wilayah sebagai sector pendukung keberhasilan.

5. Peningkatan kualitas pegawai dan penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat penguatan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil.

1. Analisia Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Kekuatan

1) Adanya Kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan internal.
2) Adanya SOP sesuai ketugasan.
3) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
4) Lingkungan kerja yang kondusif.
5) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
6) Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara Kemantren dan kelurahan.
7) Adanya data dalam dokumen perencanaan terintegrasi (*master plan*) kelurahan yang dapat digunakan untuk pedoman pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

1) Kualitas dan kuantitas personil yang ada di Kemantren Umbulharjo dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
2) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang kurang jelas.
3) Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

b) Faktor Ekternal

Peluang

1) Adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi melalui program Gandeng Gendong.
2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kemantren / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagaian kewenangan daerah kepada mantri pamong praja.
4) Adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, Terminal Giwangan, Pasar Induk Buah dan Sayur, Pasar Ikan Hygienis, Balai Benih Ikan dan XT Square Pusat Seni, Kerajinan dan Kuliner.
5) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif dengan jumlah sekolah TK sejumlah 33, SD sejumlah 19, SMP sejumlah 11 SMU/SMK sejumlah 9, dan Perguruan Tinggi sejumlah 19.
6) Adanya fasilitas wisata, pendidikan, belanja, sejarah,alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan cukup baik.
8) Adanya sarana kesehatan (Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskemas dll).
9) Ditetapkannya Kemantren Umbulharjo sebagai kawasan tumbuh kembang cepat untuk Yogyakarta wilayah selatan.

Ancaman

1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sector jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.
3) Budaya masyarakat peralihan dari *era new normal* tetap harus menggunakan pendekatan manajemen krisis.
4) Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
3) Adanya kepercayaan kepada birokrat
4) Adanya dukungan sarana dan prasarana
5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
7) Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, komunitas dan dunia usaha.
9) Adanya data dalam dokumen perencanaan terintegrasi (*master plan*) kelurahan yang dapat digunakan untuk pedoman pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas Kemantren didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Kemantren merupakan wilayah kerja mantri pamong praja sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kemantren dipimpin oleh Mantri pamong praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut **:**

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Walikota kepada mantri pamong praja masih ada yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya).

2. Belum optimalnya penataan SDM Aparatur dan masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.
3. Belum optimalnya Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana ruang pelayanan kemantren dan kelurahan yang representative.
5. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan

Aspek Kajian	**Capaian/ Kondisi saat ini**	**Standar yang digunakan**	**Faktor yang mempengaruhi**	**Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah**
Kesekretariatan	1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab	UU ASN, Perwal Anjab	Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Keamanan dan Ketertiban	1. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik disengaja atau tidak 2. Masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan 3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan	1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaran Reklame 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012	1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib dan tidak melanggar peraturan 2. masih banyak pelaku pekat	1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena tidak ada kewenangan yustisi

		tentang Pengelolaan Sampah 5. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan 6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pondokan 7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.		
Umum	1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi ketentuan 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belom maksimal 3. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan
Kemakmuran	1. sarana prasarana wilayah rusak 2. angka kemiskinan	perwal pelimpahan kewenangan	tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan	keterbatasan kewenangan Kemantren , SDM dan anggaran
Praja	Peran RT RW dalam pengurusan administrasi kependudukan yang semakin berkurang		RT RW sebagai salah satu ujung tombak dalam pengawasan lingkungan	

Sosial	1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah	Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	Masyarakat tidak menyampaikan data dan laporan kepada kelurahan	keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo . Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kemantren Umbulharjo

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan yang paling krusial di Kota Yogyakarta saat ini. Sejak diberlakukannya kebijakan penutupan sebagian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi alternatif pengelolaan sampah. Pembatasan kapasitas pembuangan di TPA Piyungan menyebabkan tidak semua sampah dari wilayah kota dapat tertangani secara optimal.

Situasi ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah, dari sistem terpusat ke pendekatan desentralisasi berbasis masyarakat, khususnya melalui pengelolaan sampah dari hulu, yaitu di tingkat rumah tangga. Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan sejumlah inisiatif seperti gerakan “Mbah Dirjo” (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja) serta “Organikkan Jogja, Olah Sampah Seko Omah” sebagai upaya untuk mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengolah sampah organik secara mandiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemantren Umbulharjo secara aktif mengambil peran dalam mendukung kebijakan darurat sampah di wilayahnya. Kemantren tidak hanya memfasilitasi edukasi kepada warga, namun juga menginisiasi berbagai gerakan dan kegiatan nyata di lapangan, antara lain:

a. Edukasi Pemilahan Sampah Sejak dari Sumber
   Masyarakat di Kemantren Umbulharjo didorong untuk memilah sampah minimal dalam tiga kategori:

- *Sampah organik*: seperti sisa makanan dan daun.
- *Sampah anorganik*: seperti kertas, botol plastik, dan kaleng.
- *Residu*: seperti pembalut, diapers, puntung rokok, dan styrofoam.

b. Pengurangan Timbulan Sampah
Masyarakat di Kemantren Umbulharjo diajak untuk:

- Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam.
- Membawa peralatan makan/minum sendiri.
- Membawa tas belanja dan belanja sesuai kebutuhan.
- Menghindari food waste.
- Tidak membuang sampah sembarangan.

c. Pengolahan dan Daur Ulang Sampah

- Sampah organik diolah dengan biopori, komposter, atau dimanfaatkan untuk pupuk organic.
- Sampah anorganik disalurkan ke bank sampah, pelapak, atau aplikasi daur ulang.

Kegiatan-kegiatan ini melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk kelurahan, RW/RT, Bank Sampah, Forum Bank Sampah Kelurahan dan Kemantren, fasilitator kelurahan (faskel), dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Bersama-sama mereka membangun gerakan masif yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Sebagai bentuk komitmen, Kemantren Umbulharjo juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola bank sampah. Pelatihan ini tidak hanya memberikan bekal pengetahuan, namun juga dilengkapi dengan bantuan perangkat administrasi yang menunjang keberlangsungan operasional bank sampah seperti timbangan sampah digital bank sampah, tas pilah sampah dan juga pengadaan gerobak sampah pilah.

Inovasi dan pelatihan dalam pengelolaan sampah organik juga diupayakan oleh pihak kemantren dan kelurahan. Salah satu Inovasi yang ditempuh oleh Kelurahan Sorosutan adalah dengan membuat Biopori Jumbo (S-Presso) untuk menjadi sarana pengolahan sampah organik masyarakat melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai di 2023. Untuk kegiatan bentuk pelatihan yang diadakan di Kelurahan di tahun 2024 dalam pengelolaan sampah antara lain dengan Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Metode Biopori yang dilaksanakan secara serempak di 7

Kelurahan dengan bersumber Dana Keistimewaan. Diluar Dana Keistimewaan, pelatihan yang diadakan di wilayah terkait penanganan sampah antara lain : Pelatihan Pengolahan Sampah Organik, Pelatihan Pembuatan Komposter Komunal, Pelatihan Pembuatan Produk Turunan Eco Enzyme, Pelatihan Panen Sampah Organik SKM, Bygjuso/Biopori Jumbo/Espreso. Selain kegiatan pelatihan, terdapat juga pengadaan sarana prasarana alat pengolahan sampah antaran lain Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah, Pengadaan Komposter Komunal, Pengadaan Timbangan Digital untuk Bank Sampah dan Pengadaan Tas Pilah Sampah di Kelurahan.

Upaya ini mencerminkan keseriusan Kemantren Umbulharjo dalam menjawab tantangan darurat sampah melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang bersih, sehat, dan lestari.

2. Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik serta regulasi yang mengatur, Kemantren Umbulharjo telah menyusun dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Namun, implementasi dari standar prosedur tersebut belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan jumlah pelaksana, terjadinya duplikasi pekerjaan, serta ketidakseimbangan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Permasalahan ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, terdapat persoalan di lapangan terkait dengan permohonan layanan masyarakat yang tidak termasuk dalam standar prosedur pelayanan yang tersedia. Hal ini sering kali terjadi karena dokumen atau surat yang dimohonkan oleh masyarakat merupakan persyaratan dari instansi atau lembaga lain di luar kewenangan Kemantren. Misalnya, surat keterangan yang diminta oleh pihak perbankan, institusi pendidikan, atau perusahaan asuransi yang bukan merupakan produk layanan dari Kemantren maupun Kelurahan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan dan kendala dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga masih tergolong rendah. Indikator dari rendahnya partisipasi ini meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur prosedurnya, serta masih seringnya masyarakat mewakilkan diri kepada orang lain dalam pengurusan pelayanan, baik di tingkat kelurahan maupun kemantren. Selain itu, masyarakat juga cenderung kurang terlibat secara langsung dalam proses pelayanan karena keterbatasan forum komunikasi yang efektif, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses terhadap informasi pelayanan.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor penghambat. Padahal, partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dibarengi dengan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperluas akses informasi, serta membangun saluran komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

3. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Merata dan Belum Optimalnya Program Pemberdayaan untuk Peningkatan Kesejahteraan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga di tingkat kelurahan dan kemantren. Melalui program-program pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, atau pranatacara, pemerintah kelurahan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki keterampilan yang dapat diandalkan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa program belum berjalan secara merata dan optimal.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya keterlibatan peserta yang beragam dalam kegiatan pelatihan. Meskipun kegiatan telah dijadwalkan pada waktu yang fleksibel, seperti sore hari, peserta yang hadir cenderung orang yang sama dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan dan inklusivitas program masih rendah, serta adanya potensi ketimpangan akses informasi atau motivasi masyarakat lain untuk berpartisipasi.

Selain itu, hasil dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat diaplikasikan atau dikembangkan oleh peserta. Banyak peserta yang tidak dapat melanjutkan praktik keterampilan yang diperoleh karena keterbatasan modal, bahan baku, tempat, maupun sarana pendukung lainnya. Hal ini menjadi kendala dalam proses transformasi pelatihan menjadi kegiatan produktif yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

Di sisi lain, upaya tindak lanjut pasca pelatihan juga masih belum maksimal. Belum terbentuknya mekanisme pendampingan, kelembagaan kelompok usaha, serta minimnya inisiatif swadaya masyarakat dalam memelihara sarana prasarana yang telah diberikan menjadi hambatan dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan hasil pemberdayaan. Padahal, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari banyaknya pelatihan yang dilakukan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, ke depan perlu dirumuskan strategi pemberdayaan yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dikembangkan antara lain:

a. Meningkatkan kualitas sosialisasi agar pelatihan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam;

b. Menyediakan skema bantuan stimulan pasca pelatihan dalam bentuk akses permodalan, bahan baku, atau fasilitas produksi;

c. Mengembangkan model inkubasi usaha atau kelompok usaha bersama yang didampingi secara berkelanjutan;

d. Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga keuangan untuk mendukung keberlanjutan program;

e. Mengoptimalkan peran kader pemberdayaan atau tokoh masyarakat dalam menggerakkan swadaya dan keterlibatan warga.

Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau formalitas belaka, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menciptakan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

4. Siaga Bencana Banjir

Kemantren Umbulharjo menghadapi permasalahan terkait siaga bencana banjir, mengingat wilayahnya dilintasi oleh dua aliran sungai besar, yaitu Sungai Gajah Wong dan Sungai Code, yang berpotensi menimbulkan banjir, khususnya di kawasan bantaran sungai. Kondisi ini diperburuk dengan masih adanya wilayah yang terdampak banjir lahar, sehingga kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana perlu terus ditingkatkan. Sungai yang seharusnya menjadi sumber daya dan potensi sosial masih sering dipandang sebagai ancaman, sementara kawasan bantaran sungai masih didominasi lingkungan kumuh dan belum tertata dengan baik. Penataan kawasan kumuh di sepanjang sungai menjadi tantangan tersendiri, bagaimana mengubahnya menjadi lingkungan yang bersih, tertata, dan memiliki nilai estetika. Selain itu, potensi bantaran sungai untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal juga belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya terkait dengan mitigasi bencana, tetapi juga harus terintegrasi dengan penataan lingkungan, pemberdayaan sosial, serta penguatan aspek ekonomi dan budaya masyarakat.

5. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Kemantren Umbulharjo menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Pertama, keterbatasan kewenangan dan pagu anggaran menyebabkan tidak semua usulan kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan. Kedua, pelaksanaan pembangunan fisik harus selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pelimpahan kewenangan kepada Mantri Pamong

Praja serta mekanisme hibah sesuai regulasi terbaru, sehingga menambah kerumitan administrasi. Ketiga, kurang optimalnya pemetaan potensi dan karakteristik masyarakat berpotensi menghambat pengembangan kampung yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi partisipasi aktif maupun kesinambungan program. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kewilayahan masih membutuhkan penguatan dalam aspek perencanaan terpadu, penentuan prioritas, serta tata kelola yang transparan dan partisipatif.

6. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Permasalahan yang muncul dalam pengarusutamaan gender pada perencanaan pembangunan di Kemantren Umbulharjo antara lain masih adanya kesenjangan dalam partisipasi antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Meskipun telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, implementasinya sering terkendala oleh keterbatasan pemahaman aparatur, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta minimnya akses kelompok rentan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, keberadaan penyandang disabilitas yang cukup signifikan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan, sehingga peran mereka masih lebih banyak sebagai objek daripada subjek pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan ruang partisipasi bagi kelompok rentan agar keadilan dan kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam pembangunan di Kemantren Umbulharjo.

7. Tantangan Peningkatan Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kemantren sebagai perangkat daerah lini terdepan di wilayah telah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023.

Pelimpahan kewenangan tersebut meliputi aspek aplikatif, koordinatif, dan fasilitatif, yang menuntut kapasitas kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur yang memadai. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Kemantren Umbulharjo yang membawahi tujuh kelurahan saat ini didukung oleh 66 pegawai, terdiri atas 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 tenaga teknis non-PNS. Dengan beban kerja yang terus meningkat, jumlah personel yang tersedia belum

sebanding dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban, terutama dalam pelayanan administratif seperti kesekretariatan, kependudukan, perizinan, dan legalisasi.

Pelimpahan kewenangan dari instansi teknis kota cenderung dilakukan secara masif, tanpa disertai penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di tingkat kemantren. Selain itu, belum terdapat mekanisme transfer SDM teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dilimpahkan, sehingga banyak tugas teknis justru dikerjakan oleh aparatur dengan latar belakang umum. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas, dan pada unit tertentu bahkan terjadi penumpukan pekerjaan yang menyebabkan fungsi pelayanan publik tidak berjalan secara ideal dan proporsional.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pegawai harus merangkap beberapa fungsi sekaligus, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang dan rawan menurunkan kualitas pelayanan. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya strategi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemutakhiran SOTK, serta dukungan kebijakan transfer pegawai teknis secara terencana.

Dari uraian diatas permasalahan terkait peningkatan kualitas dan kemampuan SDM aparatur menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu dibenahi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.2.2. Identifikasi Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Kemantren Umbulharjo adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah

Kondisi darurat sampah yang sempat terjadi di tahun 2023 mulai muncul karena ketidak mampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dalam menjalankan operasional dan disusul dengan penutupan TPA Piyungan sejak 23

Juli 2023 menyebabkan kondisi sampah yang tidak terkendali. Langkah ini terpaksa diambil karena kapasitas penampungan sampah di lahan TPA Piyungan sudah melebihi batas. Kesadaran masyarakat akan sampah masih sangat minim, bahkan setelah penutupan TPA Piyungan. Imbas dari penutupan TPA Piyungan ini juga mengakibatkan Depo pembuangan sampah yang ada di kota Yogyakarta sempat dibatasi dalam penerimaan sampah dari warga masyarakat dan juga menerapkan aturan pemilahan sampah dari warga masyarakat. Pembatasan operasional di depo sampah ini juga sempat mengakibatkan kondisi sampah yang tidak terkendali. Hal ini akhirnya disikapi oleh Kemantren Umbulharjo dengan melakukan pendekatan persuasif melalui monitoring wilayah melibatkan personel BKO dan Linmas untuk mencegah warga masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan.

Selain itu Kemantren Umbulharjo juga melaksanakan sosialisasi, penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat di kemantren dan kelurahan terkait dengan pengelolaan sampah yang baik dengan menggandeng Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan. Bank Sampah digiatkan kembali untuk mengelola sampah yang sudah tidak dapat diolah rumah tangga.

Inovasi dan pelatihan dalam pengelolaan sampah organik juga diupayakan oleh pihak kemantren dan kelurahan. Salah satu Inovasi yang ditempuh oleh Kelurahan Sorosutan adalah dengan membuat Biopori Jumbo (S-Presso) untuk menjadi sarana pengolahan sampah organik masyarakat melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai di 2023. Untuk kegiatan bentuk pelatihan yang diadakan di Kelurahan di tahun 2024 dalam pengelolaan sampah antara lain dengan Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Metode Biopori yang dilaksanakan secara serempak di 7 Kelurahan dengan bersumber Dana Keistimewaan. Diluar Dana Keistimewaan, pelatihan yang diadakan di wilayah terkait penanganan sampah antara lain : Pelatihan Pengolahan Sampah Organik, Pelatihan Pembuatan Komposter Komunal, Pelatihan Pembuatan Produk Turunan Eco Enzyme, Pelatihan Panen Sampah Organik SKM, Bygjuso/Biopori Jumbo/Espreso. Selain kegiatan pelatihan, terdapat juga pengadaan sarana prasarana alat pengolahan sampah antaran lain Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah, Pengadaan Komposter Komunal, Pengadaan Timbangan Digital untuk Bank Sampah dan Pengadaan Tas Pilah Sampah di Kelurahan.

b. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kemantren sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren

kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni pengoptimalisasian peran kemantren dalam pelayanan publik. Kemantren merupakan salah satu wadah pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa camat bertugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan melakukan percepatan pencapaian standar minimal di wilayahnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjelaskan “PATEN merupakan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik di kemantren yang pada pelaksanaan pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya dokumen hanya dilakukan pada satu tempat”. Dalam hal ini PATEN tersebut dimaksudkan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan

kemampuan atau kapasitas Kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kemantren yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren terdapat **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** yang terdiri dari dua kegiatan yaitu

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kedua kegiatan itu diampu oleh jawatan yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Jawatan Umum dan Jawatan.

Pada tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan . Berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tersebut dan arahan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta maka terjadi pengalihan aplikasi atau sistem, dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat. Dengan pengalihan sistem menjadi SIAK Terpusat ini diharapkan nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kemantren maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Gedung kantor Kemantren Umbulharjo dan beberapa kelurahan, supaya lebih representatif, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi dan arena bermain anak, kamar mandi untuk umum dan difable, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan. Selain itu juga semua Kantor Kelurahan terdapat CCTV untuk menunjang keamanan lingkungan. Dengan demikian CCTV tidak hanya di Kantor Kemantren saja, namun juga terpasang di semua Kelurahan se Kemantren Umbulharjo .

c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Kemantren Umbulharjo merupakan upaya strategis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Proses

pengambilan kebijakan dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang tingkat kampung, kelurahan, hingga kemantren, yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan jumlah penduduk yang besar, pemberdayaan menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, ketertiban, dan budaya. Permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kawasan kumuh, kesenjangan pendapatan, serta ketimpangan akses usaha menjadi isu utama. Di sisi lain, isu ketertiban muncul dari pelanggaran peraturan daerah, sedangkan isu budaya menyangkut pelestarian nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta serta pergeseran budaya perilaku masyarakat.

Tingkat keberdayaan masyarakat tercermin dari tingkat swadaya atau kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan kegiatan sosial. Oleh karena itu, penguatan swadaya masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemberdayaan.

Pencegahan stunting juga menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan warga miskin, merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender.

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kemantren melalui kegiatan fisik dan non-fisik, baik di tingkat kemantren maupun kelurahan. Kegiatan ini dikelola oleh Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran, dan para Lurah dari tujuh kelurahan di wilayah Kemantren Umbulharjo. Bentuk kegiatan meliputi pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dengan pelibatan warga sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Meski penanganan kelompok difabel bukan kewenangan langsung Kemantren (menjadi tugas Dinsosnakertrans), Kemantren tetap mengambil peran fasilitasi dan dukungan terhadap kebutuhan kelompok tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik) yang ada di semua Kelurahan se-Kemantren Umbulharjo

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan para Lurah di wilayah Kemantren Umbulharjo yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan Kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

d. Siaga Bencana Banjir

Kemantren Umbulharjo secara topografis dilintasi oleh dua aliran sungai besar, yaitu Sungai Gajah Wong dan Sungai Code. Beberapa wilayah di Kemantren, khususnya di sepanjang bantaran Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Manunggal, beberapa kali terdampak banjir lahar.

Terkait hal tersebut, kewenangan Perangkat Daerah Kemantren difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan warga. Kondisi ini menjadi isu strategis dalam penataan lingkungan sekaligus penguatan mitigasi bencana.

Sungai tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang memicu krisis sosial, namun harus dikembangkan menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial masyarakat. Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kawasan tersebut dapat diubah menjadi lingkungan yang bersih, tertata, dan memiliki nilai estetika. Lebih dari itu, kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup serta penguatan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

e. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan berbasis kewilayahan merupakan isu strategis dimana aspek kewilayahan inilah yang menjadi faktor pendorong, melalui pengembangan swadaya masyarakat dan juga inovasi-inovasi mandiri dari masyarakat. Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada pembangunan fisik harus mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023. Pembangunan kewilayahan berupa kegiatan fisik selain memperhatikan kebutuhan dan usulan warga masyarakat, harus memperhatikan juga kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren Umbulharjo, serta kemampuan pagu anggaran atau pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak semua usulan kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo. Proses pembangunan kewilayahan dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan peran serta warga masyarakat baik

dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya dengan skala prioritas dan berkelanjutan.

Kampung merupakan suatu wilayah yang dibentuk untuk menjadi basis pembangunan di Kota Yogyakarta. Kemantren Umbulharjo mempunyai 19 (sembilan belas) kampung yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan. Pemetaan potensi dan karakteristik masyarakat menjadi penting, sehingga pengembangan kampung tidak menjadi salah. Integrasi perencanaan wilayah dalam menentukan kegiatan pembangunan jangka menengah dan tahunan menjadi syarat yang harus dilaksanakan. Pembangunan berbasis kampung dengan penentuan branding kampung mampu memberikan arahan dan solusi penataan kawasan strategis yang kemudian diwujudkan melaui penentuan titik ungkit pembangunan sarana prasarana fisik, seperti bangunan pendukung sektor ekonomi dan pariwisata lokal.

Peraturan terbaru yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan penetapan kebijakan tentang Hibah, yang mewajibkan semua Pembangunan Kewilayahan yang dilaksanakan diatas tanah / alas hak bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta wajib dilaksanakan dengan mekanisme Hibah. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah menjadi dasar pelaksanaan pembangunan kewilayahan dengan mekanisme Hibah.

f. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Umbulharjo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

Isu gender menjadi penting, manakala realitas jumlah penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu modal pembangunan, maka pengarusutamaan gender menjadi

salah satu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunanan.

Selain isu gender, isu yang tidak kalah penting adalah keberadaan penyandang disabilitas. Realitas yang ada bahwa sekitar 3.400 penduduk Kota Yogyakarta sebagai penyandang disabilitas, perlu mendapat perhatian khusus sebagai bagian sumber daya manusia. Pengembangan kaum difabel yang tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan bahkan pelaku pembangunan harus diupayakan maksimal. Salah satu wujud uapaya itu adalah dibentuk Forum Kemantren Inklusi yang memiliki peran mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Pengurus Forum Kemantren Inklusi terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, perwakilan penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lain.

g. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima dan pembangunan yang berkelanjutan, Kemantren Umbulharjo telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang memerlukan penanganan serius, sistematis, dan berkesinambungan. Strategi pengatasan terhadap berbagai permasalahan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah berikut:

h. Peningkatan Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kemantren Umbulharjo adalah peningkatan kualitas dan

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. SDM aparatur memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan pelayanan publik, khususnya dalam kerangka pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial, kurangnya penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya budaya kerja produktif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik, kualitas perencanaan program, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sebagai respon atas isu strategis ini, Kemantren Umbulharjo berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui berbagai pendekatan, seperti usulan ke BPKPSDM berupa penguatan pelatihan berbasis kompetensi, pemberian ruang inovasi dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil.

Program pengembangan SDM juga akan diarahkan untuk memperkuat integritas, etika pelayanan, serta akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan demikian, aparatur Kemantren diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang berkualitas, andal, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1) Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat

Menghadapi kondisi darurat sampah pasca penutupan TPA Piyungan, Kemantren Umbulharjo mendorong pendekatan desentralisasi pengelolaan sampah dengan partisipasi aktif masyarakat. Berbagai program edukasi, seperti pemilahan sampah dari rumah, pengurangan timbulan sampah, serta pengolahan sampah organik dan anorganik dilaksanakan secara intensif. Kolaborasi dengan Forum Bank Sampah dan fasilitator kelurahan difokuskan pada pelatihan, inovasi seperti biopori jumbo (S-Presso), dan penyediaan sarana prasarana seperti gerobak dan timbangan digital. Pendekatan ini bertujuan membentuk budaya kolektif dalam pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

2) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur

Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota menuntut kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal. Kemantren Umbulharjo menghadapi tantangan dalam keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis,

pengembangan kapasitas kelembagaan, serta usulan pembaruan SOTK dan mekanisme transfer pegawai teknis agar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilimpahkan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, dan efektif dalam menjalankan pelayanan publik.

3) Optimalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pelayanan di Kemantren Umbulharjo diarahkan pada penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan optimalisasi PATEN. Untuk mengatasi kendala implementasi seperti duplikasi pekerjaan dan permintaan layanan di luar kewenangan, Kemantren terus menyempurnakan prosedur pelayanan, memperluas informasi layanan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah kelompok rentan, seperti ruang laktasi, ruang bermain, dan layanan ramah disabilitas, juga menjadi prioritas demi terciptanya pelayanan yang inklusif, cepat, dan transparan.

4) Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan

Permasalahan belum meratanya pemberdayaan masyarakat ditanggapi dengan strategi peningkatan sosialisasi agar pelatihan menjangkau lebih banyak kalangan. Selain itu, pemberian bantuan stimulan pasca pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi fokus utama. Kolaborasi dengan pihak ketiga (swasta dan perguruan tinggi) juga terus dibangun untuk mendorong inovasi dan kesinambungan program. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan program pemberdayaan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga secara merata.

5) Mitigasi Bencana dan Penataan Kawasan Sungai

Menghadapi ancaman banjir dari Sungai Code dan Gajah Wong, Kemantren memprioritaskan pengurangan risiko bencana melalui pemberdayaan masyarakat. Edukasi kesiapsiagaan, pelibatan warga dalam pemantauan lingkungan, dan penataan kawasan kumuh bantaran sungai dilakukan dengan pendekatan inklusif dan estetis. Pengembangan kawasan bantaran sungai menjadi ruang publik produktif seperti destinasi wisata lokal turut dipromosikan, guna meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi warga sekitar.

6) Pembangunan Berbasis Kewilayahan dan Branding Kampung

Pembangunan wilayah berbasis kampung menjadi strategi utama dalam mewujudkan pengembangan lokal yang berdaya saing. Dengan memanfaatkan potensi masing-masing kampung dan menetapkan branding, pembangunan diarahkan pada titik-titik strategis yang mendukung ekonomi dan pariwisata lokal. Penyesuaian dengan kewenangan, mekanisme hibah, serta pelibatan masyarakat

sejak perencanaan hingga pengawasan menjadikan pembangunan kewilayahan lebih partisipatif dan terarah.

7) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Kemantren Umbulharjo berkomitmen menjadikan pengarusutamaan gender sebagai bagian integral dalam setiap proses pembangunan. Kegiatan dan program yang dirancang mempertimbangkan keadilan gender, serta memastikan partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pembentukan Forum Kemantren Inklusi menjadi wujud nyata pengakuan terhadap peran difabel sebagai subjek pembangunan.

8) Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008, Kemantren Umbulharjo terus membangun sistem pengelolaan informasi publik yang tertib, terstandarisasi, dan mudah diakses. Pemisahan informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara cermat, guna menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD**			**Isu Strategis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
• Kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat • lingkungan hidup	• Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kemantren Umbulharjo	• Pengelolaan Persampahan Yang Belum Optimal (Pilar Lingkungan) • Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik (Pilar Lingkungan) • Penegakan hukum terkait keamanan, ketenteraman, dan ketertiban (Pilar Hutakel)	• Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota • Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	• Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahana Lingkungan • Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan • Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	• Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia • Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional • Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	• Pengelolaan Sampah • Pembangunan Kewilayahan
	• Tantangan Peningkatan Kualitas dan Kemampuan SDM Aparatur	• SDM	• Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	• Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	• Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia • Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional	• Peningkatan Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	• Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	• Pelayanan Publik • Belum Optimalnya Transportasi Publik (Pilar Lingkungan)	• Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	• Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional	• Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat • Keterbukaan Informasi Publik
• sosial • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Merata dan Belum Optimalnya Program Pemberdayaan untuk Peningkatan Kesejahteraan	• Kerentanan dan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi (Pilar Sosial)	• Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global • Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	• Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana • Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional • Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan	• Implikasi Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia • Dinamika Perkembangan Aglomerasi Perkotaan Regional • Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	• Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat • Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan bentuk konkret dari implementasi pernyataan misi, yang menggambarkan arah strategis pembangunan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Kemantren Umbulharjo telah menetapkan tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terukur.

Tujuan dan sasaran pembangunan disusun sebagai hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan tingkat kinerja tertinggi dalam pembangunan. Rumusan ini menjadi dasar utama dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, tujuan dan sasaran yang dirumuskan bersifat makro, lintas urusan, serta mencerminkan ultimate outcome, yaitu capaian akhir yang tidak lagi diturunkan menjadi indikator kinerja lanjutan.

Secara konseptual, tujuan pembangunan daerah adalah pernyataan yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Penetapan tujuan didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, dan diarahkan untuk dicapai dalam rentang waktu satu sampai lima tahun.

Perumusan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin diraih melalui pelaksanaan program-program prioritas. Tujuan pembangunan yang ditetapkan mencakup beragam fokus pembangunan, seperti penguatan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, pelestarian lingkungan hidup, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam konteks perencanaan daerah, RPJMD berperan sebagai dokumen strategis yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat serangkaian program dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi visi dalam RPJMD dituangkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah.

Visi yang dimuat dalam RPJMD bersumber dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran di KPUD pada saat pemilihan kepala daerah. Visi ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin

diwujudkan dalam masa kepemimpinan lima tahun dan menjadi acuan penerjemahan ke dalam kebijakan yang lebih konkret sehingga menghasilkan dokumen pembangunan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan serta mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 adalah: "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**"

Visi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 "**Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan**".

Visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**" akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan.
2. Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari.
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945.
5. Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY.

Sejalan dengan itu, maka Kemantren Umbulharjo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta. Adapun tujuan Kemantren Umbulharjo untuk Tahun 2025-2029 adalah **: *"Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo"*** .

Tujuan ini akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu : Indeks Pembangunan Kemantren Umbulharjo. Pada awal Renstra (tahun 2025) target yang ditetapkan adalah 502,63 poin , sedangkan target pada akhir Renstra (tahun 2029) adalah 506,40 poin.

3.2. Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kemantren Umbulharjo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi arah dan fokus capaian yang ingin diraih dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih operasional, terukur, dan terarah untuk mendukung pencapaian

visi dan misi pembangunan daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 adalah : "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo" , maka Kemantren Umbulharjo menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.***

   Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama ini adalah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo. Pada awal Renstra (tahun 2025) target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo adalah 391,29 , sedangkan target nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo pada akhir Renstra (tahun 2029) adalah 395.

2. ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif.***

   Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama ini adalah Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo. Pada awal Renstra (tahun 2025) target nilai reformasi birokrasi Kemantren Umbulharjo adalah A (89,78-90,00) , sedangkan target nilai reformasi birokrasi Kemantren Umbulharjo pada akhir Renstra (tahun 2029) adalah A (89,83-90,00).

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Kalimat kondisi;

b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan

d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kemantren Umbulharjo

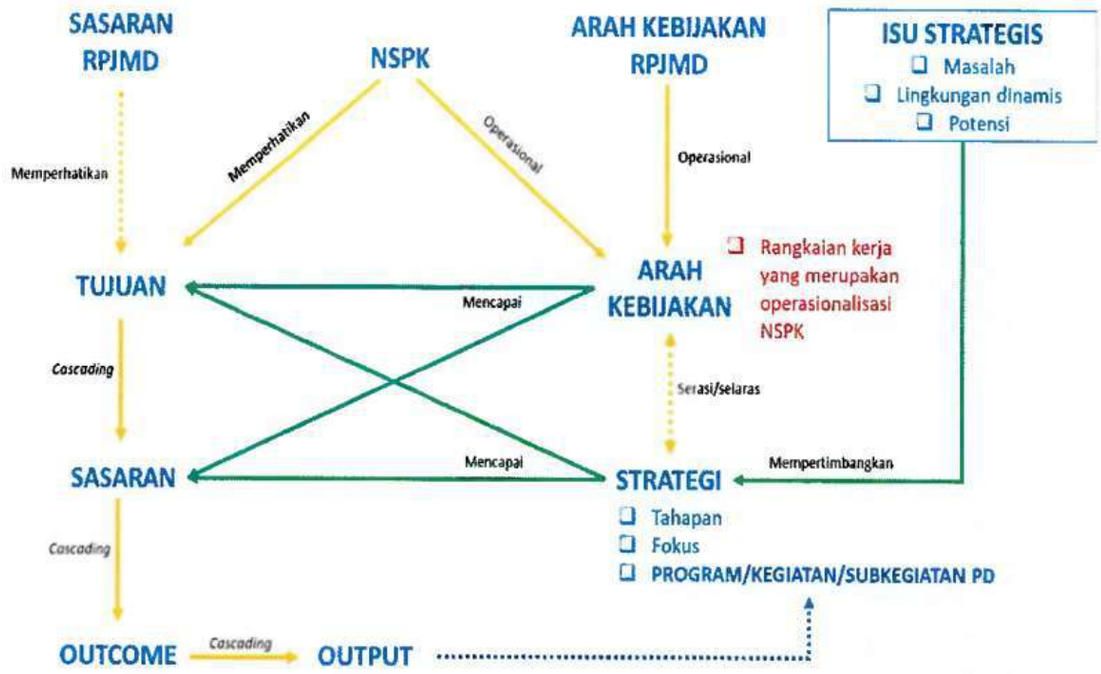

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kemantren Umbulharjo

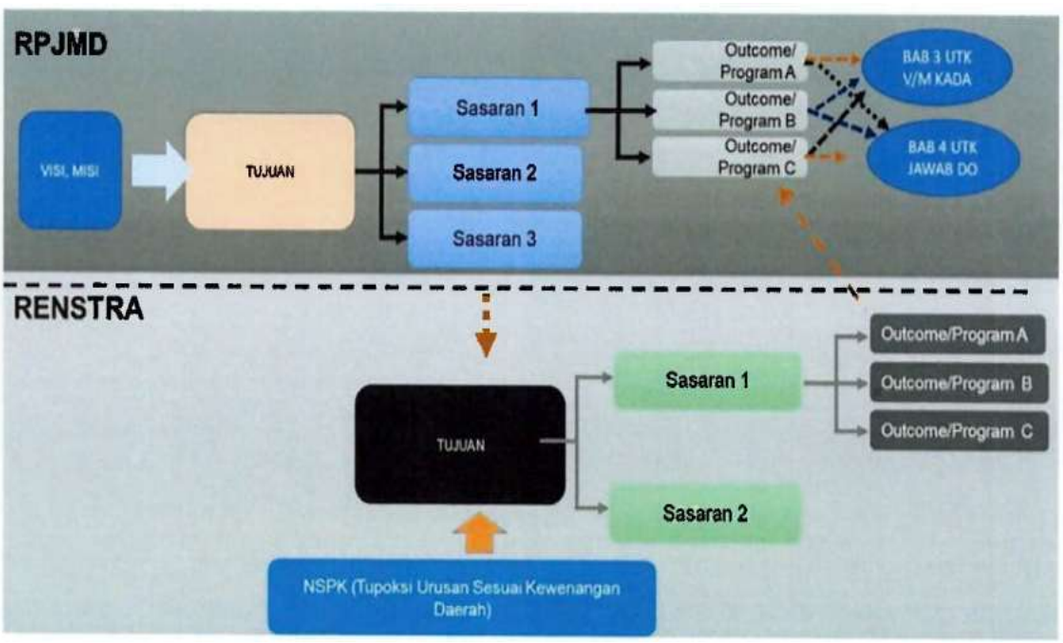

Adapun terkait dengan rumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Kemantren Umbulharjo Tahun 2025–2029 dalam penentuan targetnya menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Baseline 2024**	**Target Tahun**						**Ket.**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo		Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo	500,14	502,63	503,4	504,4	505,4	506,4	507,4	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43	391,29	392,00	393,00	394,00	395,00	396,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	A (89,77)	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,83-90,00)	

3.3. Strategi Kemantren Umbulharjo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagai "Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kemantren Umbulharjo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup PD. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Rumusan strategi dalam mendukung tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1b Tujuan, Sasaran dan Strategi Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan kreatif berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo	1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	1.1 Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo 1.2 Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat 1.3 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo 1.4 Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo
				2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	2.1 Meningkatkan Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo

3.3.1 Penahapan Pembangunan Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan merupakan strategi perencanaan tahapan kerja tahunan yang disusun secara sistematis dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Penahapan ini menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode lima tahun perencanaan.

Setiap tahapan pembangunan dirancang berdasarkan pendekatan berkelanjutan (*sustainability*), dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, urgensi penyelesaian isu strategis, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Penahapan ini juga memperhatikan sinergi antarprogram dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan, agar setiap sasaran strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penetapan prioritas tahunan dilakukan melalui proses evaluasi dan penyesuaian terhadap capaian program sebelumnya, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul selama masa pelaksanaan.

Melalui penahapan pembangunan ini, diharapkan Perangkat Daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta mewujudkan visi dan misi daerah dengan hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penahapan Renstra Kemantren Umbulharjo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kemantren Umbulharjo

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap 1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

Tahap 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

Tahap 3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah

terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

Tahap 4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Tahap 5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang

sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

3.3.2 Lokus Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Pada periode 2025–2029, Kemantren Umbulharjo difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagipercepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Umbulharjo pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.3.3 Dukungan OPD Lain dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025–2029 tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kolaborasi lintas OPD ini menjadi penting karena setiap perangkat daerah memiliki kewenangan, sumber daya, dan program yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Dukungan OPD lain diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, maupun fasilitasi teknis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta ketahanan sosial budaya.

1. Dukungan OPD untuk kegiatan Internal pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota antara lain :

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
2	BPKAD	Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
3	BKPSDM	Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4	Sekretariat Daerah	Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
5	Inspektorat	Pengawasan dan Consulting
6	Dinas Kominfo	Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan kearsipan

2. Dukungan OPD untuk kegiatan Eksternal pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik antara lain :

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dindukcapil	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perijinan
3	Dinas Kominfo	Dukungan Penyebarluasan Informasi Publik

3. Dukungan OPD untuk kegiatan Eksternal pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain :

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dinas Perdagangan	Dukungan Sektor ekonomi
2	Dinas PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Dinas PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Dinas Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Dinas Kebudayaan	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Dinas Sosial	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	DLH	Dukungan penanganan persampahan
8	Dinas Kesehatan	Dukungan penanganan Kesehatan
9	DP3AP2KB	Dukungan penanganan Kesehatan, KB
10	DPUPKP	Dukungan Sarpras
11	Dinas Dikpora	Dukungan penanganan pendidikan

4. Dukungan OPD untuk kegiatan Eksternal pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain :

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Satpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

5. Dukungan OPD untuk kegiatan Eksternal pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum antara lain :

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2.	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3.	Puskesmas	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4.	KUA	Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama
5.	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6.	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7.	Kesbangpol	Dukungan peningkatan wasbang

3.4. Arah Kebijakan Kemantren Umbulharjo Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Seluruh arah kebijakan dirancang agar selaras dengan strategi pembangunan daerah dan mendukung secara langsung pencapaian tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan kata lain, arah kebijakan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta terukur, guna memperkuat kinerja perangkat daerah sesuai mandat yang telah diberikan.

Selain itu, arah kebijakan Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika pembangunan, tantangan global dan nasional, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditetapkan diarahkan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Arah Kebijakan Renstra Kemantren Umbulharjo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kemantren	1. Meningkatkan pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Umbulharjo 2. Meningkatkan Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	
		2. Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	6. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8. Meningkatkan sarana prasarana Kewilayahan Terbangun 9. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan 10. Meningkatkan peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan 11. Meningkatkan peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan 12. Meningkatkan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			13. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	
		3. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	1. Meningkatkan operasi ketertiban 2. Meningkatkan koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	
		4. Meningkatkan sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan tingkat kemantren	1. Meningkatkan koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 2. Meningkatkan Sinergitas Forkompimtren	
2	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Umbulharjo	1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Umbulharjo 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Umbulharjo 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Umbulharjo 4. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Umbulharjo 5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			6. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Umbulharjo 7. Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Umbulharjo 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Umbulharjo	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan strategis Kemantren Umbulharjo, maka langkah-langkah operasional perlu dijabarkan secara sistematis dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan. Penyusunan langkah-langkah operasional ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kemantren serta diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang dirancang secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai hasil tertentu. Program ini dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah serta dapat melibatkan kerjasama dengan masyarakat. Setiap program disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kemantren secara lebih luas, sesuai dengan prioritas daerah.

Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari program yang menjadi instrumen pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Kegiatan dirancang untuk menghasilkan output atau luaran yang terukur dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat maupun proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kemantren.

Subkegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang memuat bentuk-bentuk aktivitas konkrit yang dilaksanakan secara langsung. Subkegiatan mencerminkan pelaksanaan teknis di lapangan dan menjadi bagian penting dalam proses pencapaian output kegiatan.

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, digunakan indikator kinerja. Indikator ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja ini mencerminkan capaian hasil, output, maupun dampak yang diharapkan dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kemantren Umbulharjo dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang telah dirumuskan, sehingga setiap elemen perencanaan memiliki keterkaitan langsung dengan capaian kinerja yang diharapkan. Penyusunan daftar program, kegiatan, dan subkegiatan ini

mengacu pada nomenklatur resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh pemutakhirannya, sehingga selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan tersebut mencakup rentang waktu pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk program yang direncanakan pada tahun 2030, dinyatakan secara eksplisit bahwa pelaksanaannya merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, sekaligus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Umbulharjo

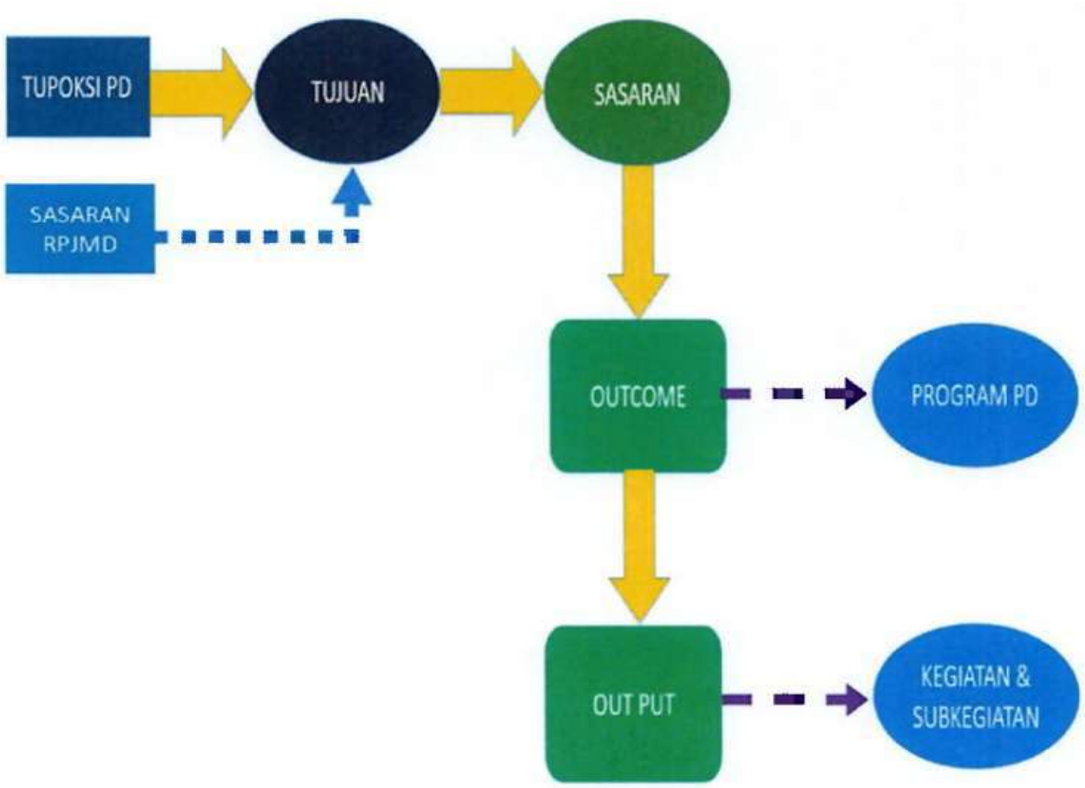

4.1. Uraian Program

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Umbulharjo didukung oleh rencana Program yang ditetapkan dalam rencana strategi Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahan. Untuk Kemantren dilaksanakan oleh 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Program ini selain dilaksanakan oleh Kemantren lewat 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran juga dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan, terdiri dari 7 kegiatan di 7 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki
2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju
3) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan
4) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto
5) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan
6) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan
7) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut:

   1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut:

   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

   1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan. Kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

4.2. Uraian Kegiatan

Dalam Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Umbulharjo, selain didukung oleh rencana Program , ada pula rencana Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan . Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 27.089.310,00

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan

13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Kemakmuran. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Keamanan. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
6) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

15. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki

16. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Mujamuju. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mujamuju
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mujamuju

17. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Tahunan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan

18. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Warungboto. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto

19. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Pandeyan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan

20. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Sorosutan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan

21. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Giwangan. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan

22. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

24. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Gelar Budaya Jogja Kemantren Umbulharjo

25. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Jawatan Kemakmuran Kemantren Umbulharjo)
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Semaki)
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Tahunan)
5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Warungboto)
6) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)
7) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)
8) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Giwangan)

4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah (PD) dilakukan melalui pendekatan cascading, yaitu menurunkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam outcome dan output yang terukur, sehingga setiap tahapan perencanaan memiliki keterkaitan logis dengan capaian kinerja yang diharapkan. Dalam proses ini, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan wajib mengacu pada nomenklatur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh pemutakhirannya, guna memastikan kesesuaian dengan kerangka regulasi nasional.

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan disusun secara berjenjang untuk periode 2025 hingga 2030, dengan memperhatikan prioritas tahunan, kesinambungan pelaksanaan, serta ketersediaan sumber daya. Khusus untuk perencanaan tahun 2030, dirumuskan secara eksplisit bahwa program dan kegiatan pada tahun tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga kesinambungan arah pembangunan PD, sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun yang sama.

Pendekatan ini memastikan bahwa RENSTRA tidak hanya bersifat jangka menengah, tetapi juga terintegrasi dengan siklus perencanaan tahunan yang berkesinambungan.

Dalam penyusunan rencana pendanaan, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, sumber pendanaan yang tersedia (APBD, APBN, maupun sumber lainnya), serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Pendanaan disusun secara terukur untuk memastikan ketercapaian target kinerja setiap tahun, sekaligus menjaga keberlanjutan program hingga akhir periode RENSTRA. Dengan demikian, rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan yang disusun menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah secara konsisten dan terintegrasi.

Terkait dengan Perumusan rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan serta Indikator Kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Umbulharjo

Tabel 4.1Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Umbulharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo				Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Semaki)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Semaki)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Muja-Muju)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Muja-Muju)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Tahunan)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Tahunan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Warungboto)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Warungboto)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pandeyan)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pandeyan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sorosutan)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sorosutan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Giwangan)		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Giwangan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Umbulharjo	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri - Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semaki)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Semaki	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Semaki)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semaki)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Semaki)	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Muja-Muju	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muja-Muju	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tahunan	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Warungboto	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandeyan	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sorosutan	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Giwangan	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Umbulharjo		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah koordinasi yang dilakukan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo		Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo		
					Nilai IKM Kemantren Umbulharjo		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Umbulharjo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Umbulharjo		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Umbulharjo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kemantren Umbulharjo	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Umbulharjo	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (Persentase)	100	100	60.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Giwangan)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Giwangan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Muja-Muju)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Muja-Muju)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pandeyan)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Pandeyan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Semaki)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Semaki)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sorosutan)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Sorosutan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Tahunan)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Tahunan)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Warungboto)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Warungboto)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan (Persentase)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				740.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Umbulharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01 - KECAMATAN						22.504.725.778,00		22.962.456.986,00		23.545.286.868,00		24.185.380.675,00		25.018.213.926,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.058.791.795,00		12.304.059.628,00		12.616.359.554,00		12.959.343.425,00		13.405.603.596,00	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo	Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo (Nilai)	A	A		A	12.058.791.795,00	A	12.304.059.628,00	A	12.616.359.554,00	A	12.959.343.425,00	A	13.405.603.596,00	
	Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo (Nilai)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		
	Nilai IKM Kemantren Umbulharjo (Nilai)	86.06	86.07		86.08		86.09		86.10		86.11		86.12		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.461.000,00		16.795.000,00		17.217.000,00		17.682.000,00		18.290.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Umbulharjo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo (Persen)	100	100	17.036.000,00	100	16.461.000,00	100	16.795.000,00	100	17.217.000,00	100	17.682.000,00	100	18.290.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Umbulharjo (Persen)	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.415.000,00		2.070.000,00		2.112.000,00		2.165.000,00		2.223.000,00		2.299.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2.415.000,00	2	2.070.000,00	2	2.112.000,00	2	2.165.000,00	2	2.223.000,00	2	2.299.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.961.000,00		4.731.000,00		4.827.000,00		4.949.000,00		5.083.000,00		5.258.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.961.000,00	1	4.731.000,00	1	4.827.000,00	1	4.949.000,00	1	5.083.000,00	1	5.258.000,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.610.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.610.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.000,00	1	1.443.000,00	1	1.482.000,00	1	1.533.000,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.610.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.610.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.000,00	1	1.443.000,00	1	1.482.000,00	1	1.533.000,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.610.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.610.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.000,00	1	1.443.000,00	1	1.482.000,00	1	1.533.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.220.000,00		4.140.000,00		4.224.000,00		4.331.000,00		4.448.000,00		4.601.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	3.220.000,00	12	4.140.000,00	12	4.224.000,00	12	4.331.000,00	12	4.448.000,00	12	4.601.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.610.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.610.000,00	1	1.380.000,00	1	1.408.000,00	1	1.443.000,00	1	1.482.000,00	1	1.533.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.850.548.000,00		7.859.442.000,00		8.019.307.628,00		8.222.878.554,00		8.446.419.425,00		8.737.265.596,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo (Nilai)	5	5	8.850.548.000,00	5	7.859.442.000,00	5	8.019.307.628,00	5	8.222.878.554,00	5	8.446.419.425,00	5	8.737.265.596,00	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.808.375.000,00		7.816.398.000,00		7.975.388.628,00		8.177.849.554,00		8.400.169.425,00		8.689.425.596,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	56	8.808.375.000,00	56	7.816.398.000,00	56	7.975.388.628,00	56	8.177.849.554,00	56	8.400.169.425,00	56	8.689.425.596,00	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37.343.000,00		38.904.000,00		39.695.000,00		40.702.000,00		41.808.000,00		43.247.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	37.343.000,00	12	38.904.000,00	12	39.695.000,00	12	40.702.000,00	12	41.808.000,00	12	43.247.000,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				805.000,00		690.000,00		704.000,00		721.000,00		740.000,00		765.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	805.000,00	12	690.000,00	12	704.000,00	12	721.000,00	12	740.000,00	12	765.000,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				805.000,00		690.000,00		704.000,00		721.000,00		740.000,00		765.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	805.000,00	1	690.000,00	1	704.000,00	1	721.000,00	1	740.000,00	1	765.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				805.000,00		690.000,00		704.000,00		721.000,00		740.000,00		765.000,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	805.000,00	1	690.000,00	1	704.000,00	1	721.000,00	1	740.000,00	1	765.000,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.610.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.610.000,00	12	1.380.000,00	12	1.408.000,00	12	1.443.000,00	12	1.482.000,00	12	1.533.000,00	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				805.000,00		690.000,00		704.000,00		721.000,00		740.000,00		765.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	805.000,00	1	690.000,00	1	704.000,00	1	721.000,00	1	740.000,00	1	765.000,00	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				67.391.000,00		62.331.000,00		63.596.000,00		65.206.000,00		66.976.000,00		69.281.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo (Nilai)	5	5	67.391.000,00	5	62.331.000,00	5	63.596.000,00	5	65.206.000,00	5	66.976.000,00	5	69.281.000,00	
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.610.000,00		690.000,00		704.000,00		721.000,00		740.000,00		765.000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.610.000,00	2	690.000,00	2	704.000,00	2	721.000,00	2	740.000,00	2	765.000,00	
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				575.000,00		575.000,00		586.000,00		600.000,00		616.000,00		637.000,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	575.000,00	1	575.000,00	1	586.000,00	1	600.000,00	1	616.000,00	1	637.000,00	
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				575.000,00		575.000,00		586.000,00		600.000,00		616.000,00		637.000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	575.000,00	1	575.000,00	1	586.000,00	1	600.000,00	1	616.000,00	1	637.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.900.000,00		2.760.000,00		2.816.000,00		2.887.000,00		2.965.000,00		3.067.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	6.900.000,00	12	2.760.000,00	12	2.816.000,00	12	2.887.000,00	12	2.965.000,00	12	3.067.000,00	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				57.156.000,00		57.156.000,00		58.318.000,00		59.798.000,00		61.423.000,00		63.538.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	57.156.000,00	12	57.156.000,00	12	58.318.000,00	12	59.798.000,00	12	61.423.000,00	12	63.538.000,00	
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				575.000,00		575.000,00		586.000,00		600.000,00		616.000,00		637.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	575000	12	575.000,00	12	586.000,00	12	600.000,00	12	616.000,00	12	637.000,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39.643.000,00		40.284.000,00		41.103.000,00		42.145.000,00		43.290.000,00		44.780.000,00	
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Umbulharjo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo (Nilai)	83,98	83,99	39.643.000,00	84	40.284.000,00	84,01	41.103.000,00	84,02	42.145.000,00	84,03	43.290.000,00	84,04	44.780.000,00	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				37.343.000,00		38.904.000,00		39.695.000,00		40.702.000,00		41.808.000,00		43.247.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	37.343.000,00	12	38.904.000,00	12	39.695.000,00	12	40.702.000,00	12	41.808.000,00	12	43.247.000,00	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.300.000,00		1.380.000,00		1.408.000,00		1.443.000,00		1.482.000,00		1.533.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	2.300.000,00	2	1.380.000,00	2	1.408.000,00	2	1.443.000,00	2	1.482.000,00	2	1.533.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				704.514.820,00		700.792.245,00		715.043.000,00		733.188.000,00		753.119.000,00		779.054.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kemantren Umbulharjo	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo (Nilai)	77,45	77,46	704.514.820,00	77,47	700.792.245,00	77,48	715.043.000,00	77,49	733.188.000,00	77,5	753.119.000,00	77,51	779.054.000,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.767.215,00		48.263.675,00		49.245.000,00		50.494.000,00		51.866.000,00		53.652.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	33.767.215,00	8	48.263.675,00	8	49.245.000,00	8	50.494.000,00	8	51.866.000,00	8	53.652.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				273.921.055,00		251.514.770,00		256.630.000,00		263.143.000,00		270.297.000,00		279.606.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	273.921.055,00	8	251.514.770,00	8	256.630.000,00	8	263.143.000,00	8	270.297.000,00	8	279.606.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.851.550,00		84.748.800,00		86.472.000,00		88.666.000,00		91.076.000,00		94.212.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	8	85.851.550,00	8	84.748.800,00	8	86.472.000,00	8	88.666.000,00	8	91.076.000,00	8	94.212.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				102.900.000,00		102.900.000,00		104.992.000,00		107.656.000,00		110.583.000,00		114.391.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	102.900.000,00	8	102.900.000,00	8	104.992.000,00	8	107.656.000,00	8	110.583.000,00	8	114.391.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.555.000,00		208.765.000,00		213.011.000,00		218.417.000,00		224.355.000,00		232.081.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	202.555.000,00	12	208.765.000,00	12	213.011.000,00	12	218.417.000,00	12	224.355.000,00	12	232.081.000,00	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.520.000,00		4.600.000,00		4.693.000,00		4.812.000,00		4.942.000,00		5.112.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8	8	5.520.000,00	8	4.600.000,00	8	4.693.000,00	8	4.812.000,00	8	4.942.000,00	8	5.112.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				397.715.700,00		145.495.000,00		148.453.000,00		152.220.000,00		156.358.000,00		161.742.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo (Nilai)	5	5	397.715.700,00	5	145.495.000,00	5	148.453.000,00	5	152.220.000,00	5	156.358.000,00	5	161.742.000,00	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		37.900.000,00		38.670.000,00		39.651.000,00		40.729.000,00		42.131.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	0	-	44	37.900.000,00	50	38.670.000,00	50	39.651.000,00	50	40.729.000,00	50	42.131.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				397.715.700,00		107.595.000,00		109.783.000,00		112.569.000,00		115.629.000,00		119.611.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	135	223	397.715.700,00	76	107.595.000,00	76	109.783.000,00	76	112.569.000,00	76	115.629.000,00	76	119.611.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.024.326.000,00		2.247.326.000,00		2.293.036.000,00		2.351.231.000,00		2.415.160.000,00		2.498.337.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Umbulharjo	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo (Persen)	100	100	2.024.326.000,00	100	2.247.326.000,00	100	2.293.036.000,00	100	2.351.231.000,00	100	2.415.160.000,00	100	2.498.337.000,00	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.650.000,00		9.650.000,00		9.846.000,00		10.095.000,00		10.369.000,00		10.726.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9.650.000,00	12	9.650.000,00	12	9.846.000,00	12	10.095.000,00	12	10.369.000,00	12	10.726.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				258.600.000,00		318.600.000,00		325.080.000,00		333.330.000,00		342.393.000,00		354.185.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	258.600.000,00	12	318.600.000,00	12	325.080.000,00	12	333.330.000,00	12	342.393.000,00	12	354.185.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.756.076.000,00		1.919.076.000,00		1.958.110.000,00		2.007.806.000,00		2.062.398.000,00		2.133.426.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.756.076.000,00	12	1.919.076.000,00	12	1.958.110.000,00	12	2.007.806.000,00	12	2.062.398.000,00	12	2.133.426.000,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				647.050.500,00		986.660.550,00		1.006.726.000,00		1.032.274.000,00		1.060.339.000,00		1.096.854.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo (Nilai)	5	5	647.050.500,00	5	986.660.550,00	5	1.006.726.000,00	5	1.032.274.000,00	5	1.060.339.000,00	5	1.096.854.000,00	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.640.000,00		26.640.000,00		27.181.000,00		27.870.000,00		28.627.000,00		29.612.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	1	26.640.000,00	1	26.640.000,00	1	27.181.000,00	1	27.870.000,00	1	28.627.000,00	1	29.612.000,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.587.500,00		134.055.250,00		136.781.000,00		140.252.000,00		144.065.000,00		149.026.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	129.587.500,00	26	134.055.250,00	26	136.781.000,00	26	140.252.000,00	26	144.065.000,00	26	149.026.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.350.000,00		15.350.000,00		15.662.000,00		16.059.000,00		16.495.000,00		17.063.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	127	127	15.350.000,00	127	15.350.000,00	127	15.662.000,00	127	16.059.000,00	127	16.495.000,00	127	17.063.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.473.000,00		101.473.000,00		103.536.000,00		106.163.000,00		109.049.000,00		112.804.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110	110	101.473.000,00	110	101.473.000,00	110	103.536.000,00	110	106.163.000,00	110	109.049.000,00	110	112.804.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				374.000.000,00		709.142.300,00		723.566.000,00		741.930.000,00		762.103.000,00		788.349.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	374.000.000,00	8	709.142.300,00	8	723.566.000,00	8	741.930.000,00	8	762.103.000,00	8	788.349.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				93.967.310,00		101.511.310,00		103.575.983,00		106.204.934,00		109.092.184,00		112.848.816,00	
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo (Poin)	114.29	114,71	93.967.310,00	115	101.511.310,00	115.14	103.575.983,00	115.29	106.204.934,00	115.57	109.092.184,00	116.14	112.848.816,00	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				24.632.310,00		27.089.310,00		27.640.000,00		28.341.000,00		29.111.000,00		30.113.000,00	
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Umbulharjo	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik (Persen)	100	100	24.632.310,00	100	27.089.310,00	100	27.640.000,00	100	28.341.000,00	100	29.111.000,00	100	30.113.000,00	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				24.632.310,00		27.089.310,00		27.640.000,00		28.341.000,00		29.111.000,00		30.113.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	24.632.310,00	1	27.089.310,00	1	27.640.000,00	1	28.341.000,00	1	29.111.000,00	1	30.113.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				69.335.000,00		74.422.000,00		75.935.983,00		77.863.934,00		79.981.184,00		82.735.816,00	
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (Persen)	100	100	69.335.000,00	100	74.422.000,00	100	75.935.983,00	100	77.863.934,00	100	79.981.184,00	100	82.735.816,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				-		3.620.000,00		3.693.983,00		3.788.934,00		3.892.184,00		4.026.816,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	-	12	3.620.000,00	12	3.693.983,00	12	3.788.934,00	12	3.892.184,00	12	4.026.816,00	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				69.335.000,00		70.802.000,00		72.242.000,00		74.075.000,00		76.089.000,00		78.709.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	69.335.000,00	12	70.802.000,00	12	72.242.000,00	12	74.075.000,00	12	76.089.000,00	12	78.709.000,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.564.752.854,00		9.908.558.673,00		10.110.092.190,00		10.366.705.140,00		10.648.530.705,00		11.015.217.116,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187,14	8.564.752.854,00	187.57	9.908.558.673,00	188	10.110.092.190,00	188.29	10.366.705.140,00	189	10.648.530.705,00	189.43	11.015.217.116,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				173.890.000,00		177.250.000,00		180.862.190,00		185.483.140,00		190.494.705,00		197.018.116,00	
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	50	50	173.890.000,00	50	177.250.000,00	50	180.862.190,00	50	185.483.140,00	50	190.494.705,00	50	197.018.116,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				173.890.000,00		177.250.000,00		180.862.190,00		185.483.140,00		190.494.705,00		197.018.116,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	7	173.890.000,00	7	177.250.000,00	7	180.862.190,00	7	185.483.140,00	7	190.494.705,00	7	197.018.116,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				8.024.791.854,00		113.003.000,00		115.300.000,00		118.225.000,00		121.439.000,00		125.620.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)	7	7	8.024.791.854,00	7	113.003.000,00	7	115.300.000,00	7	118.225.000,00	7	121.439.000,00	7	125.620.000,00	
	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu (Dokumen)	8	8		8		8		8		8		8		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				152.550.000,00		94.370.000,00		96.289.000,00		98.732.000,00		101.416.000,00		104.908.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	466	466	152.550.000,00	466	94.370.000,00	466	96.289.000,00	466	98.732.000,00	466	101.416.000,00	466	104.908.000,00	
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				31.453.000,00		18.633.000,00		19.011.000,00		19.493.000,00		20.023.000,00		20.712.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	7	31.453.000,00	1	18.633.000,00	1	19.011.000,00	1	19.493.000,00	1	20.023.000,00	1	20.712.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Semaki)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187,14		187.57	835.818.000,00	188	852.817.000,00	188.29	874.461.000,00	189	898.237.000,00	189.43	929.171.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semaki)				975.380.000,00		835.818.000,00		852.817.000,00		874.461.000,00		898.237.000,00		929.171.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Semaki)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	465.990.000,00	100	326.227.500,00	100	332.862.000,00	100	341.310.000,00	100	350.590.000,00	100	362.664.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				465.990.000,00		326.227.500,00		332.862.000,00		341.310.000,00		350.590.000,00		362.664.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	29	17	465.990.000,00	36	326.227.500,00	36	332.862.000,00	36	341.310.000,00	36	350.590.000,00	36	362.664.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Semaki)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	509.390.000,00	100	509.590.500,00	100	519.955.000,00	100	533.151.000,00	100	547.647.000,00	100	566.507.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				509.390.000,00		509.590.500,00		519.955.000,00		533.151.000,00		547.647.000,00		566.507.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	93	93	509.390.000,00	93	509.590.500,00	93	519.955.000,00	93	533.151.000,00	93	547.647.000,00	93	566.507.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Muja-Muju)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	1.330.614.350,00	188	1.357.678.000,00	188.29	1.392.135.000,00	189	1.429.986.000,00	189.43	1.479.234.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)				1.321.394.850,00		1.330.614.350,00		1.357.678.000,00		1.392.135.000,00		1.429.986.000,00		1.479.234.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Muja-Muju)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	647.735.000,00	100	595.110.700,00	100	607.215.000,00	100	622.626.000,00	100	639.555.000,00	100	661.581.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				647.735.000,00		595.110.700,00		607.215.000,00		622.626.000,00		639.555.000,00		661.581.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	332	109	647.735.000,00	152	595.110.700,00	152	607.215.000,00	152	622.626.000,00	152	639.555.000,00	152	661.581.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	673.659.850,00	100	735.503.650,00	100	750.463.000,00	100	769.509.000,00	100	790.431.000,00	100	817.653.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				673.659.850,00		735.503.650,00		750.463.000,00		769.509.000,00		790.431.000,00		817.653.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	139	139	673.659.850,00	139	735.503.650,00	139	750.463.000,00	139	769.509.000,00	139	790.431.000,00	139	817.653.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Tahunan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	1.097.794.000,00	188	1.120.122.000,00	188.29	1.148.550.000,00	189	1.179.778.000,00	189.43	1.220.408.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tahunan)				1.073.384.500,00		1.097.794.000,00		1.120.122.000,00		1.148.550.000,00		1.179.778.000,00		1.220.408.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Tahunan)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	661.757.500,00	100	630.142.500,00	100	642.959.000,00	100	659.277.000,00	100	677.202.000,00	100	700.524.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				661.757.500,00		630.142.500,00		642.959.000,00		659.277.000,00		677.202.000,00		700.524.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	95	47	661.757.500,00	69	630.142.500,00	69	642.959.000,00	69	659.277.000,00	69	677.202.000,00	69	700.524.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tahunan)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	411.627.000,00	100	467.651.500,00	100	477.163.000,00	100	489.273.000,00	100	502.576.000,00	100	519.884.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				411.627.000,00		467.651.500,00		477.163.000,00		489.273.000,00		502.576.000,00		519.884.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	129	129	411.627.000,00	129	467.651.500,00	129	477.163.000,00	129	489.273.000,00	129	502.576.000,00	129	519.884.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	973.761.900,00	188	993.567.000,00	188.29	1.018.783.000,00	189	1.046.482.000,00	189.43	1.082.522.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Warungboto)				906.411.500,00		973.761.900,00		993.567.000,00		1.018.783.000,00		1.046.482.000,00		1.082.522.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Warungboto)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	425.547.500,00	100	376.447.500,00	100	384.104.000,00	100	393.852.000,00	100	404.560.000,00	100	418.493.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				425.547.500,00		376.447.500,00		384.104.000,00		393.852.000,00		404.560.000,00		418.493.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	125	53	425.547.500,00	59	376.447.500,00	59	384.104.000,00	59	393.852.000,00	59	404.560.000,00	59	418.493.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Warungboto)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	480.864.000,00	100	597.314.400,00	100	609.463.000,00	100	624.931.000,00	100	641.922.000,00	100	664.029.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				480.864.000,00		597.314.400,00		609.463.000,00		624.931.000,00		641.922.000,00		664.029.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	99	99	480.864.000,00	99	597.314.400,00	99	609.463.000,00	99	624.931.000,00	99	641.922.000,00	99	664.029.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Pandeyan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	1.494.752.515,00	188	1.525.154.000,00	188.29	1.563.861.000,00	189	1.606.381.000,00	189.43	1.661.704.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)				1.213.602.000,00		1.494.752.515,00		1.525.154.000,00		1.563.861.000,00		1.606.381.000,00		1.661.704.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Pandeyan)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	655.027.500,00	100	876.597.015,00	100	894.426.000,00	100	917.126.000,00	100	942.062.000,00	100	974.506.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				655.027.500,00		876.597.015,00		894.426.000,00		917.126.000,00		942.062.000,00		974.506.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	120	655.027.500,00	220	876.597.015,00	220	894.426.000,00	220	917.126.000,00	220	942.062.000,00	220	974.506.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	558.574.500,00	100	618.155.500,00	100	630.728.000,00	100	646.735.000,00	100	664.319.000,00	100	687.198.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				558.574.500,00		618.155.500,00		630.728.000,00		646.735.000,00		664.319.000,00		687.198.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	134	134	558.574.500,00	134	618.155.500,00	134	630.728.000,00	134	646.735.000,00	134	664.319.000,00	134	687.198.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Sorosutan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	1.796.792.400,00	188	1.833.338.000,00	188.29	1.879.867.000,00	189	1.930.979.000,00	189.43	1.997.481.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)				1.315.512.629,00		1.796.792.400,00		1.833.338.000,00		1.879.867.000,00		1.930.979.000,00		1.997.481.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Sorosutan)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	546.331.729,00	100	1.044.774.500,00	100	1.066.025.000,00	100	1.093.080.000,00	100	1.122.800.000,00	100	1.161.469.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				546.331.729,00		1.044.774.500,00		1.066.025.000,00		1.093.080.000,00		1.122.800.000,00		1.161.469.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	270	214	546.331.729,00	41	1.044.774.500,00	41	1.066.025.000,00	41	1.093.080.000,00	41	1.122.800.000,00	41	1.161.469.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	769.180.900,00	100	752.017.900,00	100	767.313.000,00	100	786.787.000,00	100	808.179.000,00	100	836.012.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				769.180.900,00		752.017.900,00		767.313.000,00		786.787.000,00		808.179.000,00		836.012.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	180	180	769.180.900,00	180	752.017.900,00	180	767.313.000,00	180	786.787.000,00	180	808.179.000,00	180	836.012.000,00	
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Giwangan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	185.29	187.14		187.57	1.222.963.000,00	188	1.247.837.000,00	188.29	1.279.506.000,00	189	1.314.294.000,00	189.43	1.359.557.000,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Giwangan)				1.035.103.375,00		1.222.963.000,00		1.247.837.000,00		1.279.506.000,00		1.314.294.000,00		1.359.557.000,00	
Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Giwangan)	Persentase sarana prasarana terbangun (Persen)	100	100	377.413.875,00	100	462.537.500,00	100	471.945.000,00	100	483.922.000,00	100	497.079.000,00	100	514.198.000,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				377.413.875,00		462.537.500,00		471.945.000,00		483.922.000,00		497.079.000,00		514.198.000,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	59	24	377.413.875,00	146	462.537.500,00	146	471.945.000,00	146	483.922.000,00	146	497.079.000,00	146	514.198.000,00	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Giwangan)	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	100	657.689.500,00	100	760.425.500,00	100	775.892.000,00	100	795.584.000,00	100	817.215.000,00	100	845.359.000,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				657.689.500,00		760.425.500,00		775.892.000,00		795.584.000,00		817.215.000,00		845.359.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	123	123	657.689.500,00	123	760.425.500,00	123	775.892.000,00	123	795.584.000,00	123	817.215.000,00	123	845.359.000,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				213.137.000,00		721.759.500,00		736.439.000,00		755.129.000,00		775.660.000,00		802.373.000,00	
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (Persen)	100	100		100	539.908.500,00	100	550.890.000,00	100	564.871.000,00	100	580.229.000,00	100	600.212.000,00	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						539.908.500,00		550.890.000,00		564.871.000,00		580.229.000,00		600.212.000,00	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga)	0	0		451	539.908.500,00	451	550.890.000,00	451	564.871.000,00	451	580.229.000,00	451	600.212.000,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				36.990.000,00		-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	36.990.000,00	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Persen)	100	100	36.990.000,00	100	181.851.000,00	100	185.549.000,00	100	190.258.000,00	100	195.431.000,00	100	202.161.000,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				176.147.000,00		181.851.000,00		185.549.000,00		190.258.000,00		195.431.000,00		202.161.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	176.147.000,00	1	181.851.000,00	1	185.549.000,00	1	190.258.000,00	1	195.431.000,00	1	202.161.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				152.934.000,00		144.050.008,00		146.978.000,00		150.705.000,00		154.800.000,00		160.129.000,00	
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Persen)	100	100	82.194.000,00	100	64.305.000,00	100	65.612.000,00	100	67.276.000,00	100	69.105.000,00	100	71.484.000,00	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				27.509.000,00		25.770.000,00		26.294.000,00		26.961.000,00		27.694.000,00		28.647.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	80	27.509.000,00	40	25.770.000,00	40	26.294.000,00	40	26.961.000,00	40	27.694.000,00	40	28.647.000,00	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				54.685.000,00		38.535.000,00		39.318.000,00		40.315.000,00		41.411.000,00		42.837.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	100	80	54.685.000,00	80	38.535.000,00	80	39.318.000,00	80	40.315.000,00	80	41.411.000,00	80	42.837.000,00	
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100	100	70.740.000,00	100	38.090.000,00	100	38.864.000,00	100	39.849.000,00	100	40.931.000,00	100	42.340.000,00	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				31.800.000,00		16.780.000,00		17.121.000,00		17.555.000,00		18.032.000,00		18.653.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	140	281	31.800.000,00	306	16.780.000,00	306	17.121.000,00	306	17.555.000,00	306	18.032.000,00	306	18.653.000,00	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				14.570.000,00		8.410.000,00		8.581.000,00		8.798.000,00		9.037.000,00		9.348.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	70	120	14.570.000,00	140	8.410.000,00	140	8.581.000,00	140	8.798.000,00	140	9.037.000,00	140	9.348.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)			-		-		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				24.370.000,00		12.900.000,00		13.162.000,00		13.496.000,00		13.862.000,00		14.339.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	35	205	24.370.000,00	250	12.900.000,00	250	13.162.000,00	250	13.496.000,00	250	13.862.000,00	250	14.339.000,00	
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100	100	-	100	41.655.008,00	100	42.502.000,00	100	43.580.000,00	100	44.764.000,00	100	46.305.000,00	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-		41.655.008,00		42.502.000,00		43.580.000,00		44.764.000,00		46.305.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	0	-	120	41.655.008,00	120	42.502.000,00	120	43.580.000,00	120	44.764.000,00	120	46.305.000,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				242.600.000,00		267.050.000,00		272.481.620,00		279.397.711,00		286.993.317,00		296.876.047,00	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Umbulharjo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. (Persen)	100	100	242.600.000,00	100	267.050.000,00	100	272.481.620,00	100	279.397.711,00	100	286.993.317,00	100	296.876.047,00	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				242.600.000,00		267.050.000,00		272.481.620,00		279.397.711,00		286.993.317,00		296.876.047,00	
Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)	100	100	242.600.000,00	100	267.050.000,00	100	272.481.620,00	100	279.397.711,00	100	286.993.317,00	100	296.876.047,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				242.600.000,00		267.050.000,00		272.481.620,00		279.397.711,00		286.993.317,00		296.876.047,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	242.600.000,00	12	267.050.000,00	12	272.481.620,00	12	279.397.711,00	12	286.993.317,00	12	296.876.047,00	
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP (Persen)	100	100	242.600.000,00	100	267.050.000,00	100	-	100	-	100	-	100	-	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				148.708.000,00		168.814.000,00		172.247.565,00		176.619.529,00		181.421.044,00		187.668.351,00	
Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persen)	100	100	148.708.000,00	100	168.814.000,00	100	172.247.565,00	100	176.619.529,00	100	181.421.044,00	100	187.668.351,00	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				148.708.000,00		168.814.000,00		172.247.565,00		176.619.529,00		181.421.044,00		187.668.351,00	
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Persen)	100	100	20.380.000,00	100	13.970.000,00	100	14.254.565,00	100	14.617.529,00	100	15.015.044,00	100	15.531.351,00	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20.380.000,00		13.970.000,00		14.254.565,00		14.617.529,00		15.015.044,00		15.531.351,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	80	110	20.380.000,00	110	13.970.000,00	110	14.254.565,00	110	14.617.529,00	110	15.015.044,00	110	15.531.351,00	
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan (Persen)	100	100	128.328.000,00	100	154.844.000,00	100	157.993.000,00	100	162.002.000,00	100	166.406.000,00	100	172.137.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*(05)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				128.328.000,00		154.844.000,00		157.993.000,00		162.002.000,00		166.406.000,00		172.137.000,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	128.328.000,00	12	154.844.000,00	12	157.993.000,00	12	162.002.000,00	12	166.406.000,00	12	172.137.000,00	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
    a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
    c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
    a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
    b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
    c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
    a. Bela Beli Produk Warga
    b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
    c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
    a. Revitalisasi Kampung Wisata
    b. Ekonomi Olahraga; dan
    c. Penguatan akses pendanaan pembangunan

5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:

    a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.

    b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan

    c. Perlindungan Hukum bagi Warga

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui program unggulan:

    a. Bapak Asuh Keluarga Miskin

    b. Kampung Layak Huni

    c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:

    a. Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan

    b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat

    c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan

    d. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:

    a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah

    b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan

    c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil .

Kemantren Umbulharjo memang bukan OPD Penanggungjawab Program Prioritas Wali Kota Yogyakarta, namum Kemantren Umbulharjo Adalah salah satu OPD yang menjadi pendukung dari Program Prioritas Wali Kota tersebut. Berikut

Program Prioritas yang menjadi dukungan Kemantren Umbulharjo yang tertuang dalam Renstra 2025- 2029 dan dalam RPJMD 2025-2029:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kemudian dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan juga dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang adaptif.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, kemudian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kemudian dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, selanjutnya dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat dan Program Pemajuan Ekonomi Kreatif.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Jogja Tangguh Bencana.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

   Program tersebut mendukung Program Strategis Wali Kota Yogyakarta yaitu Penataan Kelembagaan yang Adaptif.

Program Prioritas tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.4.01.2.22.13.0000 - Kemantren Umbulharjo				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Semaki)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Muja-Muju)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Tahunan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Pandeyan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Sorosutan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Giwangan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Giwangan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Muja-Muju)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Tahunan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Semaki)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Pandeyan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Sorosutan)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Muja-Muju)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Pandeyan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Sorosutan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Tahunan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Giwangan)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Semaki)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Umbulharjo	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kemantren Umbulharjo Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Umbulharjo

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	7.01.4.01.2.22.13.0000 - Kemantren Umbulharjo									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo	Poin	500,14	502,63	503,4	504,4	505,4	506,4	507,4	
3.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	poin	388,43	391,29	392	393	394	395	396	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Nilai	A (89,77)	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,83-90,00)	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kota Yogyakarta. Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Umbulharjo ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Umbulharjo.

LAMPIRAN I

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

POHON KINERJA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

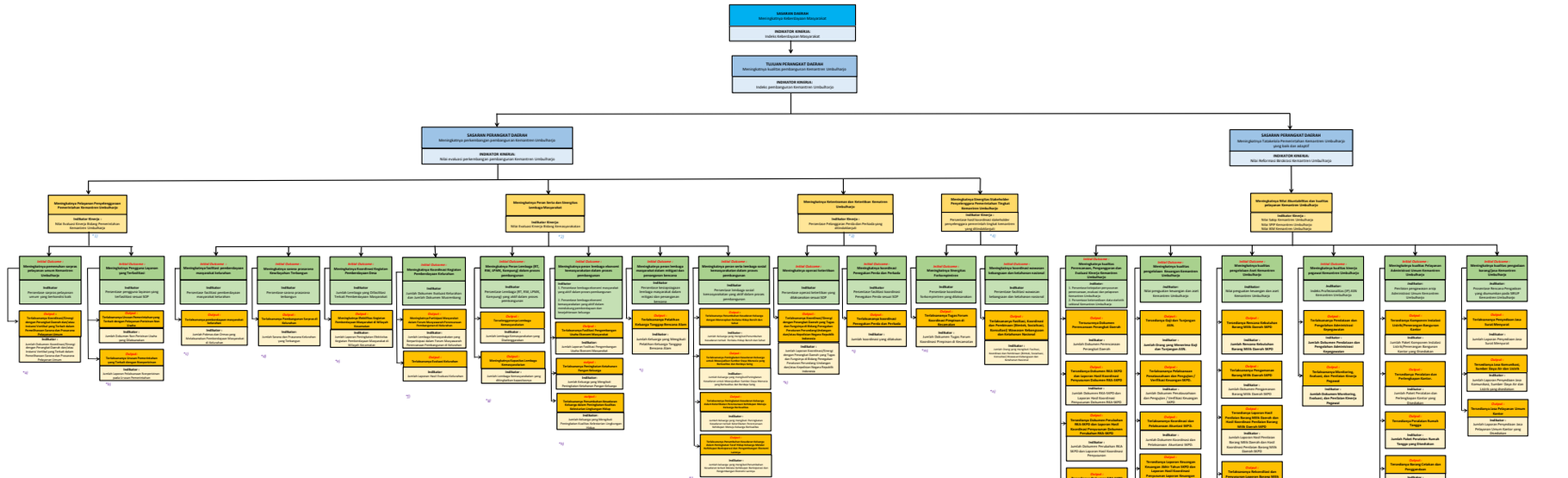

Crosscutting keluarsan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Dindukcapil	Dukungan Layanan Kependudukan
2	DPMPTSP	Dukungan Perijinan
3	Kominfo	Dukungan Pemipdarkusaan informasi Publik

Crosscutting keluarsan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Din Dag	Dukungan Sektor ekonomi
2	Din PKU	Dukungan Sektor ekonomi
3	Din PP	Dukungan Sektor ekonomi
4	Din Par	Dukungan Sektor Sosial Budaya
5	Din Bud	Dukungan Sektor Sosial Budaya
6	Din Sos	Dukungan Sektor Sosial Budaya
7	Dcktr	Dukungan pertangaran pemanapahan
8	Dinkes	Dukungan sertanerasn kesehatan
9	BPBD/PKB	Dukungan penanggulangan bik
10	DPUPRP	Dukungan Sarpras
11	Din Dikpora	Dukungan pemangkan pendidikan

Crosscutting keluarsan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Sanpol PP	Dukungan Penegakan Perda
2	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban

Crosscutting keluarsan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Polsek	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
2.	Koramil	Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban
3.	Kwilayinsi	Dukungan peningkatan kesehatan masyarakat
4.	Kesbangpol	Dukungan peningkatan kebhanmonisan dan
5.	BPBD	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
6.	Damkar	Dukungan peningkatan antisipasi kebencanaan
7.	Kesbangpol	Dukungan peningkatan asyarat

Keterangan:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengampu
*1)	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
*2)	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
*3)	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
*4)	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
*a)	Kegiatan: Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Sub-Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jawatan Kemakmuran
*b)	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub-Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Sub-Keg: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jawatan Umum Jawatan Umum
*c)	Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sub-Keg: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Kelurahan
*d)	Sub-Keg: Pemberdayaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	7 Kelurahan
*e)	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub-Keg: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jawatan Sosial
*f)	Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di Kemantren) Sub-Keg: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub-Keg: Evaluasi Kelurahan	Jawatan Praja Jawatan Praja
*g)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub-Keg: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sub-Keg: Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jawatan Praja Jawatan Praja
*h)	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub-Kegiatan: Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub-Keg: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sub-Keg: Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran
*i)	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub-Keg: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Kemakmuran
*j)	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub-Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sub-Keg: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing Sub-Keg: Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kelestarian Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Sub-Keg: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kebiasaan Berbisnesnya dan Pengembangan Ekonomi Lemah	Jawatan Sosial Jawatan Sosial Jawatan Sosial Jawatan Sosial
*k)	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub-Keg: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Sub-Keg: Koordinasi penegakan perda dan perkada	Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran
*l)	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub-Keg: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sub-Keg: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Praja Jawatan Kemakmuran

Crosscutting keluarsan:

No.	Nama OPD	Dukungan Kegiatan
1	Inspektorat	Dukungan Koordinasi, Pendampingan dan Pembinaan Administrasi terkait SPIP, LKIP, RB
2	Bagian Organisasi	Dukungan Koordinasi, Pendampingan LKIP, RB , Budaya Pemerintahan dan Penilaian Kinerja
3	Bagian Tata Pemerintahan	Dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi terkait penilaian EKK
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dukungan pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan paket pengadaan dan SIRUP
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Dukungan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dan koord pelaksanaan
6	Bagian Hukum	Dukungan Produk Hukum.
7	Bappeda	Dukungan dalam perencanaan pembangunan
8	BPKAD	Dukungan pengelolaan keuangan dan aset daerah
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dukungan dalam pendampingan pengelolaan arsip
10	Dinas Kominfo	Dukungan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Data statistik sektoral

LAMPIRAN II

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Opersional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kesnastren Unbudharjo	Meningkatnya kualitas pembangunan Kesnastren Unbudharjo	Indeks pembangunan Kesnastren Unbudharjo	80% nilai evaluasi pelkembangan pembangunan kesnastren + 20% nilai evaluasi kinerja kesnastren	502,63	503,40	504,40	505,40	506,40	507,40	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kesnastren Unbudharjo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kesnastren Unbudharjo	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	391,29	392,00	393,00	394,00	395,00	396,00	Program Penataan Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kesnastren Unbudharjo	Nilai SAKIP Kesnastren Unbudharjo Nilai SPIP Kesnastren Unbudharjo Nilai IKM Kesnastren Unbudharjo	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat - Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat - Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	A (86,69-89,69) Terkelola dan Tertakar (4,169-4,500) 86,07	A (86,70-89,70) Terkelola dan Tertakar (4,139-4,500) 86,08	A (86,71-89,71) Terkelola dan Tertakar (4,391-4,500) 86,09	A (86,72-89,72) Terkelola dan Tertakar (4,392-4,500) 86,1	A (86,73-89,73) Terkelola dan Tertakar (4,393-4,500) 86,11	A (86,75-89,75) Terkelola dan Tertakar (4,395-4,500) 86,13	Sekretariat	Penyusunan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penggunaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kesnastren Unbudharjo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesnastren Unbudharjo	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesnastren Unbudharjo yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesnastren Unbudharjo yang wajib disusun x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub. Bag Kesi PEP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bag Kesi PEP	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																								Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kesnastren Unbudharjo	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Bag Kesi PEP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bag Kesi PEP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kesnastren Unbudharjo	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kesnastren Unbudharjo oleh BPKAD	5	5	5	5	5	5	Sub Bag Kesi PEP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bag Kesi PEP	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan
																																											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Bag Kesi PEP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Bag Kesi PEP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Bag Kesi PEP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																											Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Bag Kesi PEP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran	Sub Bag Kesi PEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kesnastren Unbudharjo	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kesnastren Unbudharjo oleh BPKAD	5	5	5	5	5	5	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																																											Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
																																											Koordinasi dan Pemiliaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Pemiliaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemiliaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemiliaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemiliaan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																											Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kesnastren Unbudharjo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian IP ASN Kesnastren Unbudharjo oleh BKPSDM	83,99	84	84,01	84,02	84,03	84,04	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
																																											Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
																																				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kesnastren Unbudharjo	Penilaian Pengarsipan Arsip Administrasi Umum Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian pengarsipan arsip administrasi umum	77,46	77,47	77,48	77,49	77,5	77,52	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
																																										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
																																											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
																																											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
																																											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
																																				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kesnastren Unbudharjo	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kesnastren Unbudharjo oleh BPKAD	5	5	5	5	5	5	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian			44 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
																																										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	223 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	70 Unit	76 Unit
																																				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kesnastren Unbudharjo	Persentase Rencana Pengadaan yg diamankan pd SIRUP Bappeda dibagi pengadaan yang diamankan pada SIRUP Kesnastren Unbudharjo	Rencana pengadaan yang diamankan pada SIRUP Bappeda dibagi pengadaan yang diamankan pada SIRUP Kesnastren Unbudharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kesnastren Unbudharjo	Nilai Pengantan Keuangan dan Aset Kesnastren Unbudharjo	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kesnastren Unbudharjo oleh BPKAD	5	5	5	5	5	5	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	25 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
																																											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	2 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit
																																											Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	127 Unit	127 Unit	127 Unit	127 Unit	127 Unit	127 Unit
																																											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	110 Unit	110 Unit	110 Unit	110 Unit	110 Unit	110 Unit
																																											Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Sub Kegiatan	Sasaran Opersional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
																				Program Pembredayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	187,14	187,57	188	188,29	189	189,43	Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kesmakmuran, Jawatan Keamanan, Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pembredayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pembredayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Dibudidaya Terkait Pembredayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga	50	50	50	50	50	50	Jawatan Sosial	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembredayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pembredayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembredayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Sosial	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pembredayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri - Jumlah Dokumen Musrenbang yang Diasuun secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen	7 8	7 8	7 8	7 8	7 8	7 8	Jawatan Praja	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawaarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jawatan Praja	466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan
																																												Evaluasi Kelurahan	Terlaksanannya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jawatan Praja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Semaki	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Semaki	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Semaki	Kelurahan Semaki	17 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki	Kelurahan Semaki	93 Pokmas/ Ormas	93 Pokmas/ Ormas	93 Pokmas/ Ormas	93 Pokmas/ Ormas	93 Pokmas/ Ormas	93 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Mojo-Mojo	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Mojo-Mojo	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojo-Mojo	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojo-Mojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Mojo-Mojo	Kelurahan Mojo-Mojo	109 Unit	152 Unit	152 Unit	152 Unit	152 Unit	152 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%			Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Mojo-Mojo	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Mojo-Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Mojo-Mojo	Kelurahan Mojo-Mojo	93 Pokmas/ Ormas	139 Pokmas/ Ormas	139 Pokmas/ Ormas	139 Pokmas/ Ormas	139 Pokmas/ Ormas	139 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Tahunan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Tahunan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tahunan	Kelurahan Tahunan	47 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan	Kelurahan Tahunan	129 Pokmas/ Ormas	129 Pokmas/ Ormas	129 Pokmas/ Ormas	129 Pokmas/ Ormas	129 Pokmas/ Ormas	129 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Warungboto	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Warungboto	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Warungboto	Kelurahan Warungboto	53 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto	Kelurahan Warungboto	99 Pokmas/ Ormas	99 Pokmas/ Ormas	99 Pokmas/ Ormas	99 Pokmas/ Ormas	99 Pokmas/ Ormas	99 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Pandeyan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Pandeyan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandeyan	Kelurahan Pandeyan	120 Unit	220 Unit	220 Unit	220 Unit	220 Unit	220 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan	Kelurahan Pandeyan	134 Pokmas/ Ormas	134 Pokmas/ Ormas	134 Pokmas/ Ormas	134 Pokmas/ Ormas	134 Pokmas/ Ormas	134 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Sorosutan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Sorosutan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sorosutan	Kelurahan Sorosutan	214 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	Kelurahan Sorosutan	180 Pokmas/ Ormas	180 Pokmas/ Ormas	180 Pokmas/ Ormas	180 Pokmas/ Ormas	180 Pokmas/ Ormas	180 Pokmas/ Ormas
																																	Kegiatan Pembredayaan Kelurahan Giwangan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	Dibitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kelurahan Giwangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Giwangan	Kelurahan Giwangan	24 Unit	146 Unit	146 Unit	146 Unit	146 Unit	146 Unit
																																		Meningkatnya fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pembredayaan masyarakat kelurahan	Dibitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan	Terlaksanannya Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembredayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan	Kelurahan Giwangan	123 Pokmas/ Ormas	123 Pokmas/ Ormas	123 Pokmas/ Ormas	123 Pokmas/ Ormas	123 Pokmas/ Ormas	123 Pokmas/ Ormas
																																	Pembredayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	Dibitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jawatan Praja	0 Lembaga Kemasyarakatan	451 Lembaga Kemasyarakatan	451 Lembaga Kemasyarakatan	451 Lembaga Kemasyarakatan	451 Lembaga Kemasyarakatan	451 Lembaga Kemasyarakatan
																																											Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jawatan Praja	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan
																																		Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	Dibitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kesmakmuran	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jawatan Kesmakmuran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
																																	Pembredayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam meralisikang pembredayaan dan kesejahteraan keluarga	Dibitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam meralisikang pembredayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kesmakmuran	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksanannya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jawatan Kesmakmuran	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga
																																											Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawatan Kesmakmuran	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga	80 Keluarga
																																		Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	Dibitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dikalkusikan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Sosial	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksanannya Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jawatan Sosial	120 Keluarga	140 Keluarga	140 Keluarga	140 Keluarga	140 Keluarga	140 Keluarga
																																											Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keteresepkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksanannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keteresepkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keteresepkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jawatan Sosial	281 Keluarga	306 Keluarga	306 Keluarga	306 Keluarga	306 Keluarga	306 Keluarga
																																											Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam KetetBatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksanannya Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam KetetBatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam KetetBatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jawatan Sosial	205 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga
																																											Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tanaf Hidup Keluarga Melalui Kehalupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksanannya Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan TanafTidup Keluarga Melalui Kehalupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tanaf Hidup Keluarga melalui Kehalupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jawatan Sosial	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
																																		Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Dibitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kesmanan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksanannya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jawatan Kesmanan	0 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga
																				Program Koordinasi Ketentrteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentrteraman dan Ketertiban Kesatrcu Umbulharjo	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	Dibitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksanannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jawatan Keamanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
																																		Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	Dibitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan	Koordinasi penegakan perda dan perkada	Terlaksanannya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Jawatan Keamanan	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi	0 Koordinasi
																				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakcholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatren Umbulharjo	Persentase hasil koordinasi stakcholder penyelenggara pemerintah tingkat kecamatren yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi stakcholder penyelenggara pemerintah tingkat kecamatren yang ditindaklanjuti = Jumlah koordinasi stakcholder penyelenggara pemerintah tingkat kecamatren dibagi hasil koordinasi stakcholder penyelenggara pemerintah tingkat kecamatren yang ditindaklanjuti x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Dibitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksanannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jawatan Keamanan	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang
																																		Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	Dibitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jawatan Praja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

LAMPIRAN III

DATA KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
									Target	Target	Target	Target	Target		Target
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo	Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)				80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	500,14	502,63	503,4	504,4	505,4	506,4	506,4	507,4
						Sumber Data:									
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Semaki	Poin	395	395	395	395	395	395	395	395
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mujamuju	Poin	387	387	387	387	390	390	390	394
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tahunan	Poin	387	387	387	389	389	394	394	396
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Warungboto	Poin	369	389	394	399	402	402	402	402
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pandeyan	Poin	396	396	396	396	396	396	396	396
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sorosutan	Poin	396	396	396	396	396	396	396	396
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Giwangan	Poin	389	389	389	389	390	392	392	393
						- Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren	Poin	947	948	949	950	951	952	952	953

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target
			1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	388,43	391,29	392,00	393,00	394,00	395,00	395,00	396,00
						Sumber Data:									
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Semaki	Poin	395	395	395	395	395	395	395	395
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mujamuju	Poin	387	387	387	387	390	390	390	394
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tahunan	Poin	387	387	387	389	389	394	394	396
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Warungboto	Poin	369	389	394	399	402	402	402	402
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pandeyan	Poin	396	396	396	396	396	396	396	396
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sorosutan	Poin	396	396	396	396	396	396	396	396
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Giwangan	Poin	389	389	389	389	390	392	392	393
						Jumlah kelurahan		7	7	7	7	7	7	7	7

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target
			2.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (89,77)	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,83-90,00)
						Sumber Data:									
						Hasil penilaian RB oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (89,77)	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,82-90,00)	A (89,83-90,00)

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	Poin	114,29	114,71	115	115,14	115,29	115,57	115,57	116,14
									Sumber Data:									
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Semaki	Poin	114	114	114	114	114	114	114	114
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mujamuju	Poin	113	113	113	113	114	114	114	118
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tahunan	Poin	113	113	113	113	113	115	115	115
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Warungboto	Poin	112	115	117	118	118	118	118	118
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pandeyan	Poin	115	115	115	115	115	115	115	115
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sorosutan	Poin	115	115	115	115	115	115	115	115
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Giwangan	Poin	118	118	118	118	118	118	118	118
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	7	7	7	7	7	7	7	7
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Umbulharjo	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik		Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									- Sarpras pelayanan umum berkondisi baik	Unit	917							
									- Total Sarpras	Unit	917							
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	layanan	1159							
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi	layanan	1159							
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	185,29	187,14	187,57	188	188,29	189	189	189,43
									Sumber Data:									
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Semaki	Poin	191	191	191	191	191	191	191	191
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mujamuju	Poin	185	185	185	185	186	186	186	186
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tahunan	Poin	183	183	183	185	185	188	188	190
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Warungboto	Poin	173	186	189	190	190	190	190	190
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pandeyan	Poin	186	186	186	186	186	186	186	186
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sorosutan	Poin	194	194	194	194	194	194	194	194

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Giwangan	Poin	185	185	185	185	186	188	188	189
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	7	7	7	7	7	7	7	7
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	Lembaga	50	50	50	50	50	50	50	50
									Sumber Data:									
									Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	50	50	50	50	50	50	50	50
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		Jumlah Dokumen	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7
									Sumber Data:									
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7
							- Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8
									Sumber Data:									
									Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	29							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	29							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	93	93	93	93	93	93	93	93
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	93	93	93	93	93	93	93	93
					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja-Muju	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	332							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	332							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	139	139	139	139	139	139	139	139
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	139	139	139	139	139	139	139	139
					1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	95							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	95							

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	129	129	129	129	129	129	129	129
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	129	129	129	129	129	129	129	129
					1.1.2.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	125							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	125							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	99	99	99	99	99	99	99	99
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	99	99	99	99	99	99	99	99
					1.1.2.7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	7							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	7							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	134	134	134	134	134	134	134	134
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	134	134	134	134	134	134	134	134
					1.1.2.8 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	270							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	270							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	180	180	180	180	180	180	180	180
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	180	180	180	180	180	180	180	180

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
					1.1.2.9 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	59							
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	59							
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	123	123	123	123	123	123	123	123
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	123	123	123	123	123	123	123	123
					1.1.2.10 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	458	458	458	458	458	458	458	458
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	458	458	458	458	458	458	458	458
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	32	32	32	32	32	32	32	32
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan	lembaga	32	32	32	32	32	32	32	32
					1.1.2.11 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	32	32	32	32	32	32	32	32
									lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	32	32	32	32	32	32	32	32
						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan	Lembaga	50	50	50	50	50	50	50	50
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	Lembaga	50	50	50	50	50	50	50	50

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan	Lembaga	28	28	28	28	28	28	28	28
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan	Lembaga	28	28	28	28	28	28	28	28
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber data:									
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Pelanggaran	51							
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran	51							
					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	kali	12	12	12	12	12	12	12	12
									hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	kali	6	6	6	6	6	6	6	6
									jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	kali	6	6	6	6	6	6	6	6
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12
									jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12
2.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo	Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,68)	A (86,69-89,69)	A (86,70-89,70)	A (86,71-89,71)	A (86,72-89,72)	A (86,73-89,73)	A (86,73-89,73)	A (86,74-89,74)
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,68)							
			Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo	menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50					Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,388-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,389-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,39-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,391-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,392-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,393-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,393-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,394-4,500)
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,388-4,500)							
			Nilai IKM Kemantren Umbulharjo						Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,06	86,07	86,08	86,09	86,1	86,11	86,11	86,12
									Sumber Data:									
									Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,06							
					2.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Umbulharjo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang wajib disusun x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang disusun tepat waktu	Dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang wajib disusun	Dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030
												Target	Target	Target	Target	Target		Target
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Umbulharjo		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data:									
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
									Jumlah data statistik sektoral	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
					2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5							
					2.1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5							
					2.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Umbulharjo	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Umbulharjo oleh BKPSDM	Nilai	83,98	83,99	84	84,01	84,02	84,03	84,03	84,04
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Umbulharjo oleh BKPSDM	Nilai	83,98							
					2.1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Kemantren Umbulharjo	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	77,45	77,46	77,47	77,48	77,49	77,5	77,5	77,51
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	77,45							
					2.1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5							
					2.1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Umbulharjo	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo		Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Bappeda dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Umbulharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Sumber Data :									
									- Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Umbulharjo	Rupiah	22.832.951.008							
									- Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Umbulharjo	Rupiah	22.832.951.008							
					2.1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Umbulharjo	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
									Sumber Data:									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Umbulharjo oleh BPKAD	Nilai	5							

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KEMANTREN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA
2025

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Kotagede Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Rencana Strategis Kemantren merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan, serta target kinerja penyelenggaraan urusan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kemantren. Demikianlah Renstra Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga bermanfaat dan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan Kemantren Kotagede ke depan bisa tercapai.

Yogyakarta, 15 September 2025

Mantri Pamong Praja
Kemantren Kotagede

KOMARU MAARIF , S.I.P M.Si
Pembina Tingkat I / IV. B
NIP. 197203171997032004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta sebagai kota yang menyandang sejumlah predikat baik sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Tujuan Wisata maupun Kota Pendidikan. Berbagai predikat tersebut dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam menciptakan berbagai peluang yang menguntungkan, tetapi sebaliknya apabila kita tidak dapat mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang ada, kita akan terjerumus dalam strategi yang keliru, yang pada akhirnya akan diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan strategi perencanaannya. Berpijak dari kenyataan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf (c) dan (d) tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan HakKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Rencana strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Rencana strategis tersebut juga menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Jawatan, Sub Bagian dan Kelurahan yang ada di lingkungan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren.

Rencana Strategis Kemantren Kotagede yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategi, Program dan kegiatan secara rinci disusun secara komprehensif dan sistematis dengan kriteria sebagai berikut:

1. Realistis, aspiratif dan adaptif terhadap kebutuhan 5 (lima) tahun ke depan bagi masyarakat maupun instans
2. Sederhana, lugas dan fleksibel.

3. Mampu menyerap kondisi dinamis dan sarat dimensi dari masukan seluruh komponen masyarakat di Kemantren Kotagede yang diperoleh berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mengajukan suatu perencanaan yang berkelanjutan.
4. Mampu memuat strategi, program dan kegiatan instansi Pemerintah Kemantren Kotagede untuk jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang.
5. Sebagai komitmen guna mendukung kebijaksanaan Renstrada Kota Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kebijakan Strategi Nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah , penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Hubungan Rencana Strategis Kemantren Kotagede dengan Dokumen Perencanaan lainnya

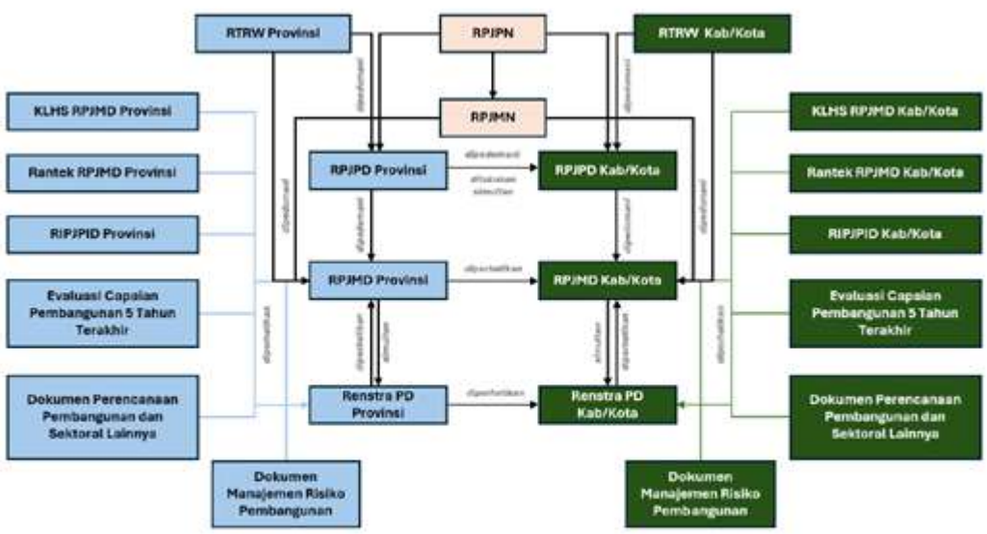

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program Kepala Daerah, yang dalam

proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
e. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penglolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
q. Peraturan Daerah IstimewaDaerah Istimewa yogyakartanomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY;
r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4)
s. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 ;
t. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);

u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan ;

v. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
w. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029;

x. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan dan peraturan walikota no 65 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Waki Kota Yogyakarta nomor 19 tahun 2023 tentang pelimpahan Sebagian kewenangan Wali kota Kepada Mantri pamong praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dari aspek urusan Pemerintahan Daerah dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Kemantren Kotagede ;

b. Menetapkan program beserta indkator kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kotagede tahun 2025-2029;

c. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;

d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;

e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;

f. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2.Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota tahun 2025-2029;
- 3.3.Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4.Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3.Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4.Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6.Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Kemantren Kotagede

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 menetapkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dan penyebutan Mantri Anom adalah Sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren yang dipimpin oleh Lurah. Ketugasan kemantren yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren; penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
i. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

k. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
l. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
n. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Struktur Organisasi Kemantren Kotagede

Struktur organisasi Kemantren Kotagede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 yang diatur secara rinci melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 dan diubah lagi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Kemantren Kotagede merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:Struktur organisasi Kemantren berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

a. Mantri Pamong Praja adalah kepala kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
b. Mantri Anom adalah sekretaris pada kemantren yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Jawatan Praja adalah sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.
d. Jawatan Keamanan adalah sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

e. Jawatan Kemakmuran adalah sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
f. Jawatan Sosial adalah sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.
g. Jawatan Umum adalah sebutan dari Seksi Pelayanan Umum.

Bagan Susunan Organisasi Kemantren Kotagede

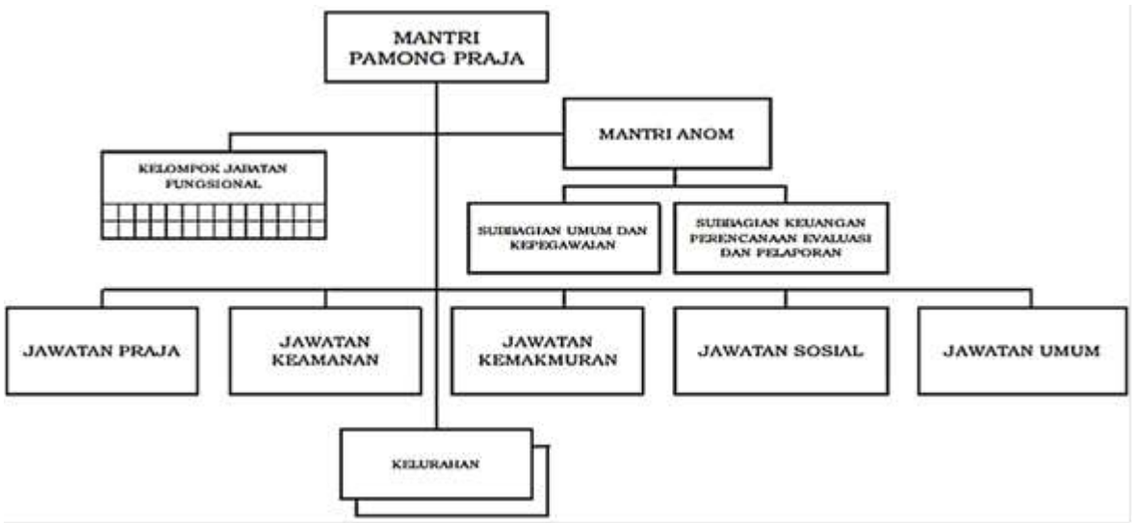

Sumber : Peaturan Walikotota Nomor 38 Tahun 2023

Gambaran tentang organisasi Kemantren Kotagede adalah :

a. Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja adalah kepala kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
b. Mantri Anom adalah sekretaris pada kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang membawahi:
   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian: melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagai berikut:
      a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
      c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
      d. pengelolaan aset Kemantren;
      e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
      f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
      g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
      h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
      i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
      j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;

k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan: melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren sebagai berikut:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
c. penatausahaan keuangan Kemantren;
d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Jawatan Praja : melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;

b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;

e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;

f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;

g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;

h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;

i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;

j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;

k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;

l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;

m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;

o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Jawatan Keamanan: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren sebagai berikut:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang- undangan lainnya;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren;
n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja

yang bertugas di Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Jawatan Kemakmuran: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren sebagai berikut:
    a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
    b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
    c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
    d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
    e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
    f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
    g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
    h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
    i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
    j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
    k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
    l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
    m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
    n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan

Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;

o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Jawatan Sosial: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan sebagai berikut:
    a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
    b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
    c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
    d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
    f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
    g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
    h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
    i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
    k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
    l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
    m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;

n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Jawatan Umum: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren sebagai berikut:
a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional: membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren dan berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan

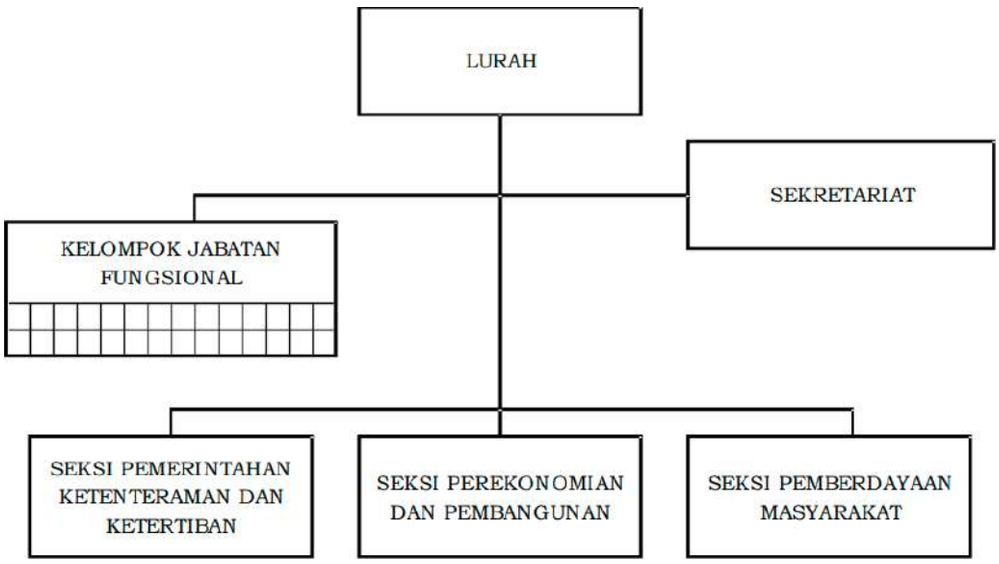

Sumber : Peaturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2023

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

a. Lurah;
b. Sekretaris Lurah;
c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
f. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Kemantren Kotagede

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 42 orang, dengan rincian 32 orang PNS, 1 orang P3K dan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) sebanyak 13 orang. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan, jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Kotagede adalah 58 orang, dan saat ini baru terpenuhi 72,41 %. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan personil hasil analisis jabatan, untuk jabatan struktural di Kemantren Kotagede belum terisi. Data mengenai komposisi pegawai Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Kemantren Kotagede Tahun 2025

Jabatan	Jumlah
PNS	
Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede	1 orang
Mantri Anom Kemantren Kotagede	1 orang
Kepala Jawatan Praja	-
Kepala Jawatan Keamanan	1 orang
Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang
Kepala Jawatan Sosial	1 orang
Kepala Jawatan Umum	-
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
Lurah	3 orang
Sekretaris Lurah	3 orang
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban	3 orang
Kasi Perekonomian dan Pembangunan	2 orang
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2 orang
Staf	7 orang
P3K	2 orang
PJLOP	13 orang
TOTAL	**42 orang**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.2

Komposisi ASN Kemantren Kotagede Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Jumlah
IV	2
III	22
II	5
I	-
TOTAL	**29**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.3

Komposisi ASN Kemantren Kotagede Berdasarkan Eselon Tahun 2025

Eselon	Jumlah
I	-
II	-
III	2
IV	18
Staf	9
TOTAL	29

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.4

Komposisi PNS dan P3K Kemantren Kotagede Berdasarkan Pendidikan tahun 2025

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	2	6,90 %
S1	18	62,07%
D3	9	31,03%
D2	-	-
SMA/SMK	-	-
SMP	-	-
SD	-	-
TOTAL	**29**	**100%**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.5

Komposisi Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) Kemantren Kotagede Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	-	-
S1	3	23,07 %
D3	-	-
D2	-	-
SMA/SMK	10	76,93%
SMP	-	-
SD	-	-
TOTAL	**13**	**100%**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai Kemantren Kotagede

Berdasarkan Struktur Organisasi Tahun 2025

Organisasi	Golongan				P3K	PJLOP	Jumlah
	IV	III	II	I			
Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede	1	-	-	-	-	-	1
Mantri Anom Kemantren Kotagede	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Jawatan Praja	-	-	-	-	1	-	1
Kepala Jawatan Keamanan	-	1	-	-	-	1	2
Kepala Jawatan Kemakmuran	1	-	-	-	-	-	1
Kepala Jawatan Sosial	-	2	-	-	-	-	2
Kepala Jawatan Umum	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1		1	4	7
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan	-	3	2	-	-	-	5

Pelaporan							
Lurah	-	3	-	-	-	-	3
Sekrertaris Lurah	-	3	-	-	-	-	3
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban	-	3	-	-	-	-	3
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	-	2	-	-	-	-	2
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	-	2
Staf	-	-	-	-	-	-	-
P3K							
Non PNS							
Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**8**
TOTAL	**2**	**22**	**3**	**0**	**2**	**13**	**42**

Sumber: SIMPEG Bulan Juni 2025

Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Kemantren Kotagede masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang. Data sarana dan prasarana Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Data Sarana dan Prasarana Kemantren Kotagede

No.	Nama Sarana Prasarana	Kemantren Kotagede	Kelurahan Rejowinangun	Kelurahan Prenggan	Kelurahan Purbayan
1	AC	12	4	1	4
2	Komputer	19	6	7	7
3	Printer	20	6	6	7
4	TV	4	1	2	1
5	Wireless	2	2	2	1
6	Brankas	1	0	1	0
7	Filling Cabinet	14	7	3	2
8	Kipas Angin	7	3	5	6
9	Sepeda	3	2	1	2
10	Kendaraan Roda 2	9	2	2	2
11	Kendaraan Roda 3	2	0	0	0
12	Kendaraan Roda 4	2	0	0	0

13	Almari Es	2	0	0	0
14	Laptop	7	2	1	1
15	Kamera Digital	3	1	1	1
16	Handycam	2	0	1	1
17	Sound System	2	2	1	1
18	Almari Besi	3	0	2	2
19	Almari Kayu	5	2	3	4
20	Almari Kaca (Besi)	5	3	2	0
21	Layar	3	2	1	1
22	LCD	3	2	0	1
23	Telepon/Fax	7	1	1	1
24	Scanner	1	0	0	0
25	Sofa	5	1	1	1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Kotagede

Kemantren Kotagede sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkatKemantren. Dalam Renstra Periode 2023-2026 dalam rangka mendukung urusan tersebut ditetapkan dua tujuan Kemantren Kotagede yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 399 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.
2. Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah AA sedangkan target pada akhir Renstra sesuai dengan Review Renstra adalah A.

Sasaran Strategis Kemantren Kotagede adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatknya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede. Sasaran Strategis tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede. Pada awal Renstra

nilai indikator sasaran adalah 399 sedangkan target sasaran pada akhir Renstra adalah 400.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede diukur dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah AA sedangkan target pada akhir Renstra sesuai dengan Review Renstra adalah A.

Tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut didukung oleh program kegiatan yang diampu oleh Kemantren Kotagede yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan target dan realisasi lima tahun terakhir (2020-2024) sebagaima tertuang dalam tabel di bawah ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan PerangkatDaerah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Tahun 2020-2024

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Tahun 2020-2024

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2020		2021		2022	
							Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
		Tujuan Daerah 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta										
		VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan										
		MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat										
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kotagede	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah Kotagede	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan /Kemantre n Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Perkembangan Kel. Rejowinangun ditambah Kel. Prenggan ditambah Kel. Purbayan dibagi 3	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	395,7	400,33	396,33	396,33	398	398
						Sumber Data :	395,7	400,33	396,33	396,33	398	398
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun	396	398	398	398	398	398
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan	392	391	394	394	399	399
						- Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan	398	398	398	398	398	398
						Jumlah Kelurahan	3	3	3	3	3	3

Program PD (Program Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Indikator Program mendukung Sasaran PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2020		2021		2022	
						Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
Review 2021 Program Berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020											
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25		89,40	90,10	89,90	90,15	90,50	90,60
				Sumber Data :							
				- Nilai survei kepuasan masyarakat	poin	89,40	90,10	89,90	90,15	90,50	90,60
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
		Angka Swadaya Murni	Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan		2.760.000.000	3.054.605.439	2.700.000.000	2.822.346.500	2.960.000.000	3.201.358.000
				Sumber Data:		2.760.000.000	3.054.605.439	2.700.000.000	2.822.346.500	2.960.000.000	3.201.358.000
				- Dana Swadaya Murni Masyarakat Kel Rejowinangun	rupiah	900.000.000	955.205.000	900.000.000	1.011.260.100	910.000.000	1.251.770.000
				- Dana Swadaya Murni Masyarakat Kel Prenggan	rupiah	840.000.000	840.000.439	900.000.000	910.537.000	1.140.000.000	1.140.374.100
				- Dana Swadaya Murni Masyarakat Kel Purbayan	rupiah	1.020.000.000	1.259.400.000	900.000.000	900.549.500	910.000.000	1.015.463.900
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Perda		-	-	24	24	24	24
				Sumber Data:							
				Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Kotagede		-	-	24	24	24	24

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2023-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum								
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dihitung dari Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Rejowinangun ditambah Kel. Prenggan ditambah Kel. Purbayan dibagi 3	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	399,00	399,25	399,00	402,47
			Sumber data :		399,00	399,25	399,00	402,47
			Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun		399	399,25	399	408
			Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan		399	399	399	399,90
			Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan		399	399,50	399	399,50
			Jumlah kelurahan		3	3	3	3
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90)	Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	AA	AA	A	A
			Sumber Data:					
			Hasil penilaian RB Kotagede oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kotagede 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kotagede 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kotagede 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Kotagede 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik		90,88	95,65	A	A

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	Poin	91,00	91,20	91,20	91,20
		Sumber data :	Poin	91,00	91,20	91,20	91,20
		Nilai survei kepuasan masyarakat	Poin	91,00	91,20	91,20	91,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	Rupiah	3.231.358.000	3.252.164.700	3.261.358.000	3.319.283.100
		Sumber data :		3.231.358.000	3.252.164.700	3.261.358.000	3.319.283.100
		Dana Swadaya Masyarakat Total Kel Rejowinangun		1.148.820.000	1.167.980.000	1.158.820.000	1.214.764.000
		Dana Swadaya Masyarakat Total Kel Prengan		1.150.374.100	1.150.464.100	1.160.374.100	1.160.414.200
		Dana Swadaya Masyarakat Total Kel Purbayan		932.163.900	933.720.600	942.163.900	944.104.900
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede =Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	36	27	36	28
		Sumber data :		36	27	36	28
		Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Kotagede	Pelanggaran	36	27	36	28
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x 100%	Persen	100%	100%	100	100%
		Sumber data :	Persen	100 %	100%	100%	100%
		Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Masalah	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede	Masalah	100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Nilai	A	A	A	A
		Sumber data :					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede		A	A	A	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kotagede pada awal Tahun 2020 dalam Renstra 2017-2022 memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai Survey Kepuasanan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat, kemudian pada Tahun 2020 tersebut ada review indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada Tahun 2021 dilakukan review renstra yaitu review indikator program berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede menjadi 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan indikator program bertambah 1 (satu) yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga ada 3 (tiga) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Kotagede menurun dengan indikator jumlah pelanggaran perda menurun dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Berdasarakan tabel penyandingan di atas capaian periode Renstra 2017- 2022 untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program sampai dengan Tahun 2022 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Kotagede dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan .

Sementara untuk capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024 ditayangkan dalam tabel yang berbeda karena periode Renstranya berbeda yaitu Periode Renstra 2023-2026. Dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kotagede ada perubahan, di periode Renstra Tahun 2017-2022 hanya ada satu IKU yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dari sasaran Strategis Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede meningkat dengan mendukung Misi Kota Yogyakarta Misi 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat, sementara di periode Renstra Tahun 2023-2026 ada dua IKU dari dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangun Kemantren Kotagede dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan mendukung Misi Kota Yogyakarta. Misi 5 yaitu

Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, dan Misi 6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum. Sehingga dalam penyandingan target Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena berbeda periode Renstra tersebut mengalami sedikit kesulitan, sehingga untuk secara sederhananya tersaji seperti tabel di atas.

Dari capaian 5 lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran dan indikator program setiap tahunnya sudah melebihi dari yang di targetkan, keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

Didukung oleh program kegiatan di Kemantren Kotagede dan partisipasi warga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kemantren Kotagede tersebut;

Kepemimpinan Mantri Pamong Praja dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan kepada mitra kerja pemerintah dan warga mayarakat untuk mendukung dan mensukseskan program dan kegiatan di Kemantren Kotagede dan juga dengan dukungan lewat swadaya masyarakat total;

Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Mantri Pamong Praja, Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang;

Semangat warga masyarakat untuk membangun wilayahnya;

Koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Forkompimka dan juga OPD terkait terlaksana dengan baik untuk menyelesaikan permasalah yang timbul di Kemantren Kotagede;

Inovasi Kemantren Kotagede:

a. TEKO PERAKKU (Teknologi dan Kolaborasi Industri Kriya Logam Kotagede Bernilai Heritage dan Unggul) Teko Perakku merupakan inovasi digital bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yaitu dengan membangun Sistem Infomasi yang memuat data Company Profil, iklan baris, custom desain produk, dan pemberdayaan pengrajin. Berkolaborasi dengan 2 universitas dan berbagai disiplin ilmu serta 5 laboratorium desain produk UKDW
b. JOGOMIDAS (Pojok Gelaran Ptoduk Ekonomi Kreatif UMKM dan Inklusif) Inovasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha ekonomi mayarakat dengan pembuatan infrastruktur berupa toko oleh-oleh khas Kotagede yang menampung semua produk industri kreatif UMKM dan inklusif di wilayah Kemantren Kotagede. Kolaborasi dengan Universitas dilakukan untuk pendampingan manajemen bisnis mulai dari proses produksi, packaging, digital marketing, dan literasi keuangan. Penguatan modal dilaksanakan dengan membentuk koperasi UMKM bekerjasama dengan

BSI.

c. JAMU KI PELARIS (Janji Temu Konsultasi Pelayanan Waris) Jamu Ki Pelaris (Janji Temu Konsultasi Pelayanan Waris) Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan waris di Kemantren Kotagede dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya fasilitasi mediasi sengketa waris dan layanan konsultasi terkait waris. Permasalahan yang terkait dengan waris dapat diselesaikan dan dimediasi serta konsultasi dengan pihak yang berkompeten. Maka dari itu Kemantren Kotagede berusaha memberikan fasilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga hukum yang dapat memberikan konsultasi terkait waris.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 19 tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Walikota melimpahkan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Mantri Pamong Praja. Ayat 2 berbunyi Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintahan umum
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat FKDM dan FKP
b. Pendidikan
   Diwujudkan dalam bentuk dukungan pelaksanaan JBM
c. Kesehatan
   Diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis Kewilayahan
d. Pekerjaan umum dan penataan ruang
   Antara lain:
   - Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan
   - Sosialisasi peraturan terkait penataan ruang dan perizinan
e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   Antara lain:
   - PRB (Pengurangan Risiko Bencana);
   - Pemeliharaan alat pemadam api ringan; dan
   - Pengadaan dan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (closed circuit television).
f. Sosial
   Diwujudkan dalam bentuk pembinaan bantuan sosial pangan.
g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   Meliputi:
   - Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
   - Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja operasional posyandu;
   - Pelaksanaan program kegiatan gerakan sayang ibu; dan
   - Pelaksanaan program kegaitan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
h. Pertanahan

Berupa mediasi awal terhadap permasalahan tanah yang terjadi di Kemantren antara lain:

- Pemilik tanah persil dengan pemilik fasilitas umum; atau
- Pemilik tanah persil dengan pemilik tanah persil lainnya.

i. Lingkungan hidup

Meliputi:

- Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan berupa taman, pohon perindang dan /atau pergola
- Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan
- Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah
- Pengolahan sampah organik dengan cara : komposter drum, budi daya magot, eco enzyme, kerangjang takakura, ember tumpuk, lodong sisa dapur (losida), pengoposan dengan cacing, biopori jumbo atau lubang tabung air (biopori)

j. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meliputi:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelayanan e-mobile pembuatan KTP elektronik dan atau pelayanan mobile administrasi kependudukan di Kemantren
- Menyediakan fasilitas sarana prasarana pelayanan administrasi Kependudukan
- Menunjuk personil untuk membantu tugas pelayanan administrasi kependudukan

k. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Berupa fasilitasi koordinasi kegiatan kampung keluarga berkualitas

l. Perhubungan

Meliputi:

- Perencanaan dan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan di jalan Lingkungan
- Pengadaan cermin tikungan
- Pemeliharaan cermin tikungan

m. Kebudayaan

Meliputi:

- Penguatan kebudayaan di Kemantren dan pemberian fasilitasi organisasi kebudayaan yang ada di kemantren

n. Perdagangan

Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan melalui online single submission (OSS).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Belum optimalnya Pengelolaan sampah

Belum optimalnya pengurangan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 3R mencakup mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan

sampah, menggunakan kembali barang yang masih berguna, dan mendaur ulang sampah menjadi barang baru.

- Reduce (mengurangi)

  Antara lain: mengurangi konsumsi: pilih produk dengan kemasan minimal atau yang bisa diisi ulang. Hindari penggunaan alat makan sekali pakai dan beli bahan makanan secukupnya. Memilih produk ramah Lingkungan : pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Mengurangi pemborosan : periksa dokumen sebelum dicetak, gunakan email untuk berkirim surat dan hindari penggunaan kertas yang berlebihan.
- Reuse (menggunakan ulang)

  Antara lain: manfaatkan barang bekas: gunakan kembali botol kaca atau plastik sebagai wadah penyimpanan, kertas bekas untuk catatan, atau pakaian bekas untuk kain lap. Gunakan barang bekas untuk fungsi lainnya: misalnya gunakan botol galon untuk pot tanaman atau kaleng bekas untuk wadah penyimpanan. Donasi barang yang masih berguna.
- Recycle (mendaur ulang)

  Mendaur ulang sampah menjadi bahan baku baru dan pemanfaatan bahan baku tersebut untuk membuat produk baru.

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat memilah sampah.

Memilah sampah dari sumbernya adalah memisahkan jenis-jenis sampah di tempat sampah rumah tangga atau sumber lainnya (seperti sekolah, kantor, dll.) menjadi beberapa kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, terutama dalam proses daur ulang dan pengolahan menjadi produk baru atau pupuk kompos. Manfaat memilah sampah antara lain:

- Memudahkan Daur Ulang:

  Sampah yang sudah dipilah, terutama sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca, lebih mudah didaur ulang menjadi bahan baku baru atau produk lain.
- Mempermudah Pengelolaan:

  Pemilahan sampah memudahkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), dan mengoptimalkan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- Mengurangi Pencemaran Lingkungan:

  Dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, potensi pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat diminimalkan.
- Menghemat Sumber Daya Alam:

  Daur ulang sampah yang sudah dipilah dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru, seperti kayu, logam, dan minyak bumi. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah, termasuk pelarangan pembuangan sampah langsung ke depo

dan mewajibkan penggunaan jasa penggerobak (transporter) di setiap RW. Selain itu, ada upaya desentralisasi pengelolaan sampah, dengan membangun beberapa lokasi penanganan sampah sementara seperti TPS 3R Nitikan. Pemerintah juga berfokus pada pengelolaan sampah harian dan memaksimalkan fungsi posko darurat serta menargetkan penutupan permanen TPS. Bank sampah di Kota Yogyakarta memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memberikan nilai ekonomis dari sampah yang dikelola. Selain itu, bank sampah juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Bank Sampah masing-masing RW di Kemantren Kotagede diikutkan dalam upaya memilah sampah.

c. Belum optimalnya program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   - Peserta yang hadir sebagian besar orang yang sama padahal sudahdilaksanakan di sore hari (kurangnya kaderisasi kelembagaan);
   - Kurang kesadaran mempratekkan hasil pelatihan karena terkendala dana, tempat, bahan baku;
   - Belum maksimalnya tindak lanjut keberlangsungan dan pengembangan hasil pelatihan (prosentase tindak lanjut masih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta)
   - Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan swadaya masyarakat masih kurang
   - Tidak adanya bantuan transpot masyarakat mengurangi tingkat kehadiran masyarakat.

d. Belum optimalnya penangulangan permasalahan stunting.

   Masih tingginya tingkat Angka Stuntung di Kemantren Kotagede

   Belum optimalnya penanganan permasalahan stunting di Kotagede bisa jadi di sebabkan oleh beberapa faktor yang umum terjadi dalam penanganan stunting di Indonesia. Berikut beberapa aspek yang mungkin mempengaruhi :

   Faktor Penyebab Belum Optimalnya Penanganan Stunting

   - Koordinasi Antar Sektor

     Lemahnya koordinasi antara pemerintah Pusat dan daerah , serta antar sektor di daerah yaitu Dinas Kesehatan , DP3AP2KB, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Kemantren dan Kelurahan dapat menghambat pelaksanaan Program Program Intervensi gizi spesifik dan sensitif.
   - Kapasitas Pemerintah Daerah

     Ketidak setaraan kapasitas daerah dalam mengelola program penanganan stunting dapat mempengaruhi efektifas pelaksanaan program
   - Alokasi Anggaran

     Penanganan Stuntung memerlukan anggaran yang memadai namun alokasi anggaran untuk sektor Kesehatan masih terbatas

e. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata
   - belum optimalnya kolaborasi antara Kemantren dan pemangku kepentingan yang bergerak di sektor pariwisata,
   - belum optimalnya promosi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi, belum terintegrasinya potensi wisata yang berbasis sektor industri,
   - belum optimalnya pengembangan potensi kampung wisata sebagai destinasi wisata baru.

f. Belum optimalnya pengembangan budi daya tanaman pangan
   dengan memanfaatkan lahan sempit di perkotaan bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini diantaranya disebabkan kurangnya intensivikasi, diversifikasi, dan pengembangan perbenihan/pembibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian, serta daya tarik pertanian terutama pada kalangan muda semakin menurun.

g. Belum optimalnya penataan dan pembinaan PKL (Pedagang Kaki Lima).

h. Pembangunan industri kerajinan logam belum memiliki fungsi sebagai motor penggerak perekonomian, sehingga identitas Kotagede sebagai Kota Perak tidak berkelanjutan.

i. Belum optimalnya kolaborasi dengan Universitas dan Dunia Usaha sehingga kerjasama yang telah dilaksanakan melalui MoU dan MoA perlu dipertahankan implementasinya agar kerjasama yang ada bersifat implementatif.

j. Belum optimalnya UMKM di Kemantren Kotagede

k. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral dan data spasial statistik

l. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan
   yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan layanan kearsipan dan masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan di PD.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam pembangunan daerah adalah kondisi atau keadaan yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas karena berdampak signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu strategis pembangunan di Kemantren Kotagede dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan di wilayah Kemantren Kotagede, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya,ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain:

a. Isu strategis global, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kemantren Kotagede,
b. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Yogyakarta, serta

c. Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosila budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Isu Strategis Global SDG's *(Sustainable Development Goals)*

Dengan berakhirnya agenda pembangunan *global Millenium Development Goals (MDG's)* tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan selain itu isu strategis nasional lainnya yaitu berkaitan dengan penurunan angka stunting.

Isu Strategis Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 – 2025 antara lain :

1. Pengelolaan sampah berkaitan dengan kebijjakan desentralisasi sampah
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
4. Penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga peningkatan ekonomi
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai peluang untuk pengembangan ekonomi, pariwisata dan budaya dengan adanya penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Tema RKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta adalah pemantapan pembangunan manusia dengan dukungan layanan publik berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan memuat tiga kata kunci yaitu Pemantapan Pembangunan Manusia, Layanan Publik Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

Adanya keterbatasan sumber daya alam dan luas wilayah Kota Yogyakarta yang sempit, maka fokus pembangunan terletak pada :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk di dalamnya afirmasi kelompok rentan yaitu warga miskin, perempuan, anak, disabilitas dan lansia sebagai bagian dari masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2. Peningkatan perkonomian inklusif dan berkelanjutan.
3. Pemantapan sarana dan prasarana di wilayah yang fokusnya pada pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi
5. Penerapan konsep perencanan THIS atau Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial berkaitan dengan branding Kawasan Cagar Budaya dan dukungan terhadap sumbu filosofi.

Berdasarkan agenda pembangunan global dan daerah yang berkelanjutan tersebut beberapa **isu strategis Kemantren Kotagede yaitu**:

1. **Pengelolaan Sampah melalui upaya edukatif, promotif dan pemantapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik dan**

anorganik belum optimal. Regulasi baru yang berlaku di pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penanganan sampah rumah tangga, perlu ditindaklanjuti dengan optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah. Keberadaan Bank Sampah di seluruh wilayah Kemantren Kotagede perlu didorong lebih aktif dan intensif lagi dalam operasionalisasinya, baik dalam pengelolaan sampah anorganik maupun organik. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah, termasuk pelarangan pembuangan sampah langsung ke depo dan mewajibkan penggunaan jasa penggerobak (transporter) di setiap RW.

2. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**.
   a. Kegiatan pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi warga untuk terus mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik. Selain itu untuk peningkatan derajat hidup warga masyarakat, Kemantren Kotagede selalu menganggarkan pendanaan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, sarana prasarana umum serta akses jalan pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman dan layak huni bagi warga masyarakat.
   b. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan angka kemiskinan melalui skema “Gandeng Gendong” dapat menggerakkan roda perekonomian di level bawah dan memberikan kesempatan berusaha bagi warga kurang mampu. Selain itu program ini juga mampu merubah skema pasar karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pemesanan jamuan rapat-rapat OPD ke kelompok Gandeng Gendong, Gerai UMKM yang dilaksanakan di Kemantren Kotagede , Mengangkat kembali industri perak .

3. Pengurangan resiko stunting

Peran serta stakeholder sangat berperan dalam mengurangi angka prevalensi stunting dengan mengkoordinir dan melaksanakan bantuan bahan makanan bergizi secara kosisten dan monitoringdengan penguatan kelembagaan menggerakkan kader, RT, RW,LPMK dan Kampung agar peduli dengan lingkungan masingmasing mencegah stunting. Untuk tahun 2025, melalui dana keistimewaan untuk mengurangi resiko stunting.

Upaya Pencegahan dan penanganan stunting :

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
  Pemberian tambahan makanan untuk ibu hamil beresiko, memenuhi gizi sangat penting untuk mencegah stunting dan untuk baduta terindikasi stunting dan juga baduta turun BB.
- Pemberian Fe (vitamin penambah darah) untuk remaja putri
  Melalui sekolah sekolah diadakan gerakan minum vitamin penambah darah untuk remaja putri , untuk mencegah anemia remaja putri sejak dini sebagai calon ibu.
- Pemberian ASI Eksklusif dan Pemantauan tumbuh kembang anak

ASI Eksklusif selama 6 bulan dapat mengurangi peluang resiko stunting dan Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak untuk mendeteksi gejala awal stunting. Segala upaya pencegahan dan penanggualngan stunting telah dilakukan , namun demikian angka stunting di kemantren Kotagede masih tinggi

4. **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin dan difabel (Pengarusutamaan Gender). Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

5. **Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi.**

Kemantren Kotagede dan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah dua hal yang saling terkait. Sumbu Filosofi memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat Jawa, yang melambangkan perjalanan manusia dari lahir hingga kembali ke Sang Pencipta. Kemantren Kotagede ikut mengkondisikan cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi. Kondisi saat ini semakin luntur adat istiadat Jawa (unggah-ungguh) di tengah masyarakat terbukti anak-anak kecil dan remaja dalam kehidupan sehari-hari kurang memahami dari bahasa, adat istiadat, dan sopan santun Jawa.

Tabel 2.9
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu Kajian Lingk Hidup yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemilahan sampah Tingkat rumah tangga sudah dilakukan dan Bank sampah sudah terbentuk di masing-masing RW. Pembuangan sampah sudah melalui penggerobak.	Penanganan sampah belum optimal	Pengelolaan persampahan belum optimal	Pengelolaan sampah, polusi udara dan air. Isu sampah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dan upaya pengurangan sampah dari sumbernya	pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan, bagaimana mengurangi timbunan sampah, dan meningkatkan penanganan sampah.	dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak optimal, termasuk volume sampah yang terus meningkat dan kurangnya infrastruktur pengumpulan serta pembuangan yang memadai.	Penanganan sampah dengan tertib dalam membuang sampah , memilah sampah dan mengelola sampah.
Pengurangan resiko Stunting	Jumlah baduta stnting tinggi	Permaslahan Kesehatan Masyarakat disebabkan kekurangan gizi kronis dan pola asuh	Perubahan Iklim peningkatan suhu globaldan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan air bersih , yang berdampak pada kesehatan dan gizi masyarakat	Kekurangan Gizi Indonesia masih menghadapi masalah stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada anak anak (Baduta)	Pengelolaan air dan sanitasi : Kualitas air dan sanitasi yg buruk dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan meningkatkan resiko stunting	-pemeriksaan tumbuh kembang anak belum rutin -Pola asuh belum optimal -pengurangan resiko stunting
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan pelatihan peningkatan	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah	- Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan	memastikan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai	memastikan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan	Pembangunan kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu Kajian Lingk Hidup yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
perekonomian kepada UMKM dan warga masyarakat - Sosial melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		- Tantangan terhadap pendidikan dan kualitas SDM yang berdaya saing global	sosial, serta meningkatkan kualitas hidup manusia	dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.	dan juga peningkatan kualitas SDM. memastikan bahwa rencana pembangunan, termasuk yang berfokus pada peningkatan SDM, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial	
- Pemberdayaan Masyarakat dengan pelatihan-pelatihan - Sosial, melibatkan seluruh kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kerentanan dan Kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi	bagaimana pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka diperhatikan dalam setiap tahapan	memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembangunan, serta perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	bagaimana kebijakan, rencana, dan program pembangunan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi mereka	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Pemerataan Pengarusutamaan Gender

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu Kajian Lingk Hidup yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kemantren Kotagede berperan penting dalam menjaga dan melestarikan kawasan sumbu filosofi ini, termasuk kebersihan dan keberlanjutannya, serta mendukung upaya menjadikan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia.	Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah	Budaya DIY dan nilai-nilai keistimewaan	Memastikan bahwa warisan budaya, seperti Sumbu Filosofi, tetap lestari dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi fokus, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan pelestarian warisan budaya	Menjaga kondisi cagar budaya dan adat budaya sebagai pendukung sumbu filosofi

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Kota Yogyakarta tersebut adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan 2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya local 4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD1945 5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	T1.Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	T2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	S3. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
		S4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
		S5. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
		S6. Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib
	T3. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	S7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

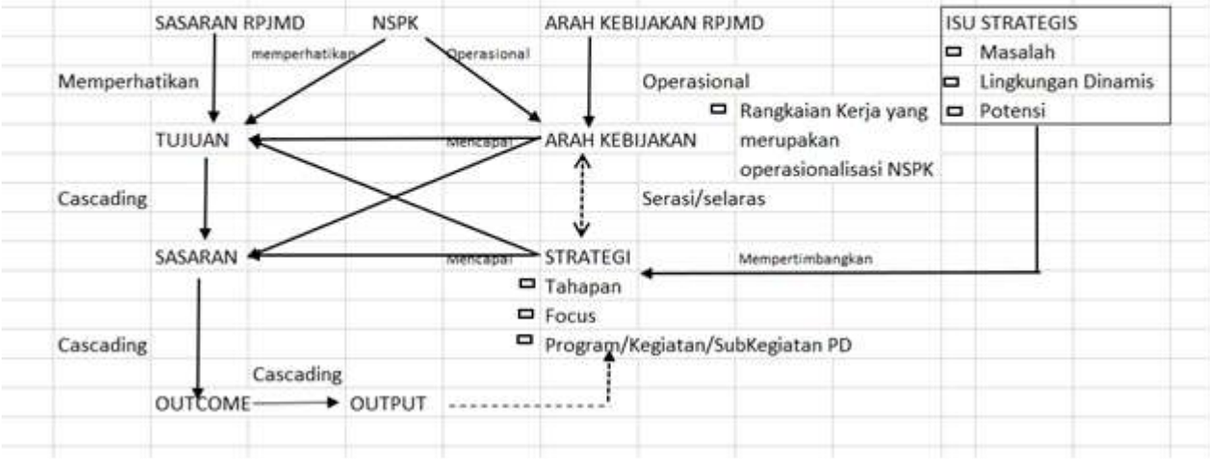

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

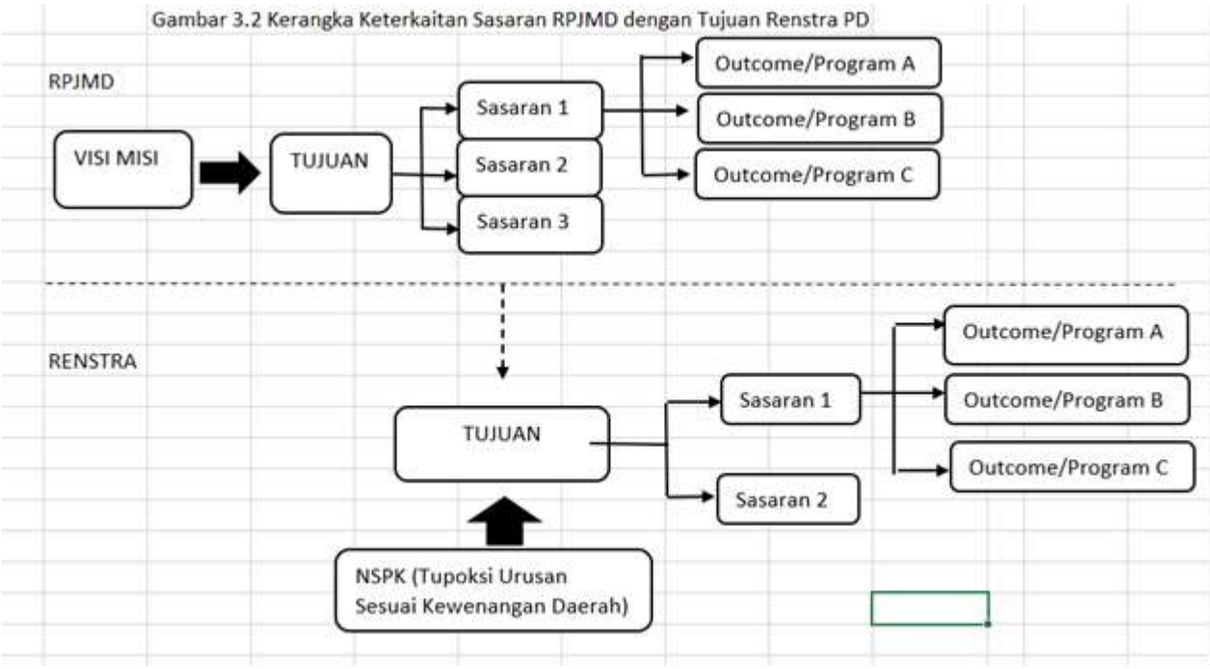

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kemantren Kotagede akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan, adapun **tujuan Kemantren** Kotagede **sebagai berikut: Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren** Kotagede

- Indikator kinerja: Indeks pembangunan Kemantren Kotagede.
- Formula Perhitungan: 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.
- Tujuan Kemantren Kotagede mendukung Tujuan Pemerintah Kota ke-2 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
- Serta mendukung Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta ke-4 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029

Sasaran Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede
   - Indikator kinerja : Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede;
   - Formula Perhitungan: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede =Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif
   - Indikator kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Kotagede;
   - Formula Perhitungan: Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Adapun Teknik Merumuskan tujuan san Sasaran Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede.		Indeks pembangunan Kemantren Kotagede	521,57 poin	521,60 poin	521,74 poin	521,74 poin	521,75 poin	521,82 poin	
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	402,47 poin	402,50 poin	402,67 poin	402,67 poin	402,67 poin	402,75 poin	
		Meningkatnya Tatakelola Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Kotagede	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	

Crosscutting ketugasan di Kemantren Kotagede sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede
   - Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kotagede
   - Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:
     a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Dindukcapil) Dukungan layanan Kependudukan di Kemantren Kotagede.
     b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
        Dukungan Layanan perijinan di Kemantren Kotagede
     c. Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Persandian (Dinas Kominfosandi) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Kotagede. Berikut adalah beberapa peran Dinkominfo bagi Kemantren Kotagede :
        - Pengembangan Sistem Informasi dan digitalisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian membantu menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan pengelolaan informasi serta dalam pelaksanaan manajemen kewilayahan dan manajemen perkantoran. Selama ini kebutuhan terkait pemanfaatan perangkat IT baik hardware maupun software yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di wilayah telah tersedia dengan baik antara lain aplikasi JSS yang mewadahi hampir semua sarana IT yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masyarakat.

- Penguatan Infrastruktur TIK di wilayah Kemantren Kotagede Dinkominfo bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur TIK di wilayah Kemantren Kotagede baik jaringan komunikasi dan koneksi internet yang handal, sehingga serta penyediaan perangkat CCTV di wilayah untuk mendukung operasional dan konektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar lebih optimal.
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK
  Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian turut serta mendukung program pemberdayaan masyarakat Kemantern Kotagede dengan pemanfaatan TIK untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, misalnya dengan menyediakan aplikasi atau platform digital untuk pelaporan dan pemantauan proyek infrastruktur, menyediakan layanan-layanan publik secara digital, termasuk pelayanan perizinan, informasi publik, dan layanan elektronik lainnya terkait pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara onlline.
- Pengelolaan Media Sosial dan Website
  Untuk menjamin keterbukaan informasi publik di kemantren Kotagede, Dinkominfosan memiliki peran dalam memberikan akses media sosial dan website resmi untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, menyampaikan informasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan di kemantren Kotagede dan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat, selain itu juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan.
- Pengamanan dan Perlindungan Data
  Dinkominfosan berperan atas pengamanan dan perlindungan data dan informasi yang dikelola oleh Kemantren Kotagede

d. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Dukungan layanan Pembangunan sarana prasarana di Kemantren Kotagede .

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Sasaran Program: Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:
  a. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
     Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Kotagede .
  b. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Kotagede
  c. Dinas Pertanian & Pangan Kota Yogyakarta
     Dukungan sektor ekonomi di Kemantren Kotagede
  d. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
     Dukungan Sektor Sosial Budaya di Kemantren Kotagede
  e. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
     Dukungan Sektor Sosial Budaya di Kemantren Kotagede
  f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
     Dukungan sektor Sosial Budaya kemantren Kotagede
  g. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
     - Masalah Persampahan
       Dalam mewujudkan kebersihan wilayah maka DLH bertanggungjawab untuk mengkondisikan agar sampah di depo-depo sampah bisa terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Kewajiban Kemantren kelurahan dalam penanganan sampah adalah mengkondisikan warga masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, menggerakkan Bank Sampah agar optimal dan memastikan transporter bekerja sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin bahwa semua rumah tangga sudah berlangganan ke penggerobak.
     - Pemeliharaan taman
       DLH berperan untuk menjamin bahwa taman-taman kota yang ada di sepanjang jalan arteri dan Runag Terbuka Hijau Publik (RTHP) selalu terpelihara. Selain itu DLH berperan untuk melakukan pemeliharaan/ pemangkasan pohon-pohon di ruang publik yang mengganggu lingkungan sekitar.
  h. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
     - Dinas Kesehatan berperan memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat dan memberikan informasi berkaitan dengan pencegahan dan peanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
     - Sedangkan peran Kemantren dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat adalah dengan membangun sarpras dan lingkungan yang bersih, membangun MCK yang representatif,

melakukan sosialisasi tentang kesehatan jiwa, pola hidup sehata dan pola makanan sehat bagi masyarakat.

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB) DP3AP2KB memiliki peranan sebagai leading sektor beberapa program pemberdayaan di wilayah, adapaun irisan peranan DP3AP2KB sebagai berikut :

- Penyelenggaraan dan pembinaan Posyandu

  Keberadaan lembaga Posyandu saat ini mulai ditingkatkan peranannya, untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dibawah koordinasi kemantren dan juga Puskesmas melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita, Ibu Hamil dan lansia di masing- masing RW. Dalam hal ini DP3AP2KB berperan untuk mengembangkan lembaga ini menjadi 6 SPM seperti amanat peraturan tentang posyandu dan memfasilitasi agar posyandu 6 SPM dapat berjalan optimal di wilayah.Tanggung jawab Kemantren adalah memastikan bahwa posyandu dimasing-masing RW dapat terus berjalan.
- DP3AP2KB membentuk Satgas Sigrak dan Mitra keluarga untuk membantu mengantisipasi dan menangani kasus di wilayah berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga , permasalahan tumbuh kembang anak dan permasalahan perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan.
- Penanganan masalah stunting, DP3AP2KB bertanggungjawab untuk melaksanakan program penanganan stunting dan pengurangan resiko stunting di wilayah.Sedangkan ketugasan kemantren dan puskesmas adalah menyiapkan data sasaran melakukan pemantauan perkembangan dan melakukan sosialisasi agar angka stunting semakin menurun.

j. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) DPUPKP merupakan mitra Kemantren dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana maupun infrastruktur wilayah, adapun pembagian peranannya sebagai berikut :

- Pembangunan skala besar /bangunan berstruktur menjadi kewenangan DPUPKP, sedangkan pemeliharaan gedung bangunan yang tidak merubah struktur menjadi kewenangan kemantren.
- Pemeliharaan jalan lingkungan

  Jalan kampung yang tidak beraspal menjadi kewenangan Kemantren sedangkan untuk jalan yang beraspal dan bernomor ruas jalan menjadi tanggung kjawan DPUPKP
- Lampu PJU Kampung

  Untuk pemasangan tiang lampu PJU menjadi kewenangan DPUPKP, sedangkan ketugasan Kemantren/kelurahan adalah

melakukan pemeliharaan PJU Kampung dengan penggantian lampu dan penggantian MCB.

k. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta
Dukungan penanganan Pendidikan di Kemantren Kotagede

l. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
- Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan membina lembaga – lembaga sosial masyarakat seperti LPMK, Kampung, RT dan RW.
- Memberikan arahan kepada Kemantren dalam pelaksanaaan ketugasan kewilayahan.
- Mengkoordinasikan permasalahan kewilayahan.
- Membina dan menetapkan batas-batas wilayah Kemantren dan kelurahan serta mengkoordinasikan penggabungan dan pemekaran wilayah RT.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Sasaran Program: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede
- Indikator Kinerja: Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:
  a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP)
     Dukungan Penegakan Perda (operasi penertiban PKL, Pondokan, spanduk dan vandalisme)
  b. Polisi Sektor di Kemantren Kotagede
     Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Kotagede
  c. Koramil di Kemantren Kotagede
     Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Kotagede

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Sasaran Program: Meningkatnya Sinergitas Stakeholdel Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede.
- Indikator Kinerja : Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti.
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:
  a. Polisi Sektor di Kemantren Kotagede
     Dukungan peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kemantren Kotagede
  b. Koramil di Kemantren Kotagede Dukungan peningkatan keamanandan ketertiban di lingkungan Kemantren Kotagede

c. Puskesmas di Kemantren Kotagede

Dukungan peningkatan Kesehatan Masyarakat di kemantren Kotagede

b. KUA di kemantren Kotagede

Dukungan peningkatan keharmonisan dan toleransi beragama

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Kotagede, adapun irisan peranan BPBD sebagai berikut :

- Pemetaan Risiko Bencana dan mitigasi bencana BPBD melakukan pemetaan risiko bencana di wilayahnya, berupa identifikasi daerah rawan bencana dan potensi kebencanaan, termasuk juga di wilayah Kemantren Kotagede.
- Membentuk Kampung Tangguh Bencana di wilayahuntuk mengantisipasi kebencanaan di wilayah BPBD telah membentuk dan melatih KTB agar dapat menangani evakuasi dan penyelamatan korban bencana. BPBD juga memberikan fasilitasi peralatan untuk penanganan kebencanaaan skala ringan kepada KTB.
- Pemulihan dan Rehabilitasi pasca bencana Dalam hal terjadi bencana BPBD memberikan bantuan logistik berupa makakan, obat-obatan dan sarana lain yang diperlukan warga korban bencana.

f. Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Yogaykarta

Dukungan peningkatan antisipasi Kebakaran di Kemantren Kotagede.

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Dukungan peningkatan Wawasan kebangsaan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede
- Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Kemantren Kotagede, Nilai SPIP Kemantren Kotagede, Nilai IKM Kemantren Kotagede
- Crosscutting Ketugasan dengan instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam mendukung dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan di Kemantren Kotagede dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah.

- Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Rencana Stategis (Renstra) Kemantaren Kotagede:

Bappeda berperan dalam memberikan arah kebijakan pembangunan di Kemantren Kotagede dengan menetapkan sasaran stategis yang harus diwujudkan di tingkat Kemantren dan memetapkan program kegiatan yang dilaksanakan, agar selaras dengan sasaran dan arah pembangunan kota Yogyakarta.

- Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

  Bappeda berperan mengkoordinasikan penyusunan RKPD Kemantren Kotagede yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bappeda mengkoordinasasikan agar perencanaan pembangunan di wilayah bisa di support oleh OPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD. Sehingga Kemantren Kotagede fokus pada program kegiatan yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada kemantren, dan untuk yang di luar kewenangan, Bappeda berperan untuk mengkoordinasikan agar dilaksanakan oleh OPD teknis.

- Evaluasi Program/ kegiatan Kemantren

  Bappeda memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan di Kemantrern Kotagede untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi output dan outcome yang dihasilkan. Bappeda juga menganalisa efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target program yang ditetapkan.

- Pengembangan Kebijakan dan Regulasi untuk Kemantren

  Bappeda membantu membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan pembangunan Infrastruktur, bidsng ekonomi maupun sosial di wilayah Kemantren, dengan membuat kajian tematik roadmap pengembangan kawasan khususnya untuk kemantren.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung kinerja Kemantren Kotagede terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien. Berikut adalah irisan peran BKAD yang mendukung pelaksanaan tugas di kemantren Kotagede :

- Penyusunan perencanaan anggaran Kemantren dan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa serta barang milik daerah. BKAD dalam hal ini TAPD membantu dalam penyusunan rencana anggaran tahunan Kemantren agar perencanaan penganggaran dapat memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- Membina dan mendampingi Kemantren Kotagede dalam proses pengelolaan/pelaksanaan anggaran.

- Memberikan fasilitasi berupa kebijakan dan perangkat lunak/software untuk pengelolaan keuangan berbasis IT. Dalam hal ini BPKAD selalu membuat kebijakan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di Kemantren Kotagede melalui Sisdur Pengelolaan Keuangan, Surat Edaran dan juga kebijakan-kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan anggaran Kemantren. BPKAD juga memfasilitasi dengan sistem keuangan yang berlaku secara nasional dalam pelaksanaan anggaran agar semua transaksi dapat termonitor oleh pusat serta menjamin akuntabilitas keuangan daerah.
- Memberikan pendampingan dan memonitor penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pengelolaan manajemen aset daerah. Dalam hal ini BPKAD selalu mengarahkan Kemantren Kotagede agar dalam pencatatan aset di Kemantren Kotagede dapat berjalan dengan baik dan selalu sinkron untuk setiap bulannya dengan adanya rekonsiliasi aset yang dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD. BPKAD juga mendororng agar pemeliharaan dan pemafaatan aset bisa dilaksanakan secara efisien.
- BPKAD melalui TAPD membantu memastikan bahwa kebutuhan Kemantren Kotagede dalam melaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

c. Inspektorat Kota Yogyakarta

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program/kegiatan yang dilaksanakan Kemantren Kotagede. Berikut adalah beberapa crosscutting Inspektorat Kota Yogyakarta dengan Kemantren Kotagede:

- Audit Kinerja: Inspektorat melakukan pembinaan dan audit terhadap kinerja Kemantren Kotagede secara berkala untuk memastikan bahwa Kemantren Kotagede telah melaksanakan kinerja organisasi secara optimal. Inspektorat kota Yogyakarta mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan Keuangan: Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemantren Kotagede untuk memastikan keakuratan kecukupan, dan kepatuhan terhadap prosedur penatausahaan anggaran. Dan Inspektorat berperan untuk mengendalikan agar tidak terjadi praktik korupsi , markup anggaran dan gratifikasi di lingkungan Kemantren Kotagede.
- Pengawasan Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa: Inspektorat berperan memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Kemantren Kotagede telah

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan proses pengadaan yang tepat dan dilaksanakan dengan Pejabat Pengadaan dari Bagian Pengadaan Baranag dan jasa yang telah ditunjuk. Dengan peran ini diharapkan Kemantren Kotagede dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga.

- Pengawasan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum wilayah Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik wilayah yang dilaksanakan oleh Kemantren, termasuk pengecekan kualitas material yang digunakan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian dengan rencana dan spesifikasi teknis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pekerjaan fisik wilayah hasil bagus dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi anggaran dan kualitas pekerjaan. Dengan demikian Inspektorat kota Yogyakarta berperan dalam menjaga agar Kemantren Kotagede menjalankan tugasnya secara efektif,efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Kemantren Kotagede dalam pelaksanaaan pengadaan barang/jasa. Berikut adalah beberapa irisan ketugasan yang saling mendukung dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kemantren Kotagede.

- Penyusunan Rencana Pengadaan

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa yang ada di Kemantren Kotagede Kebijakan yang diterapkan di Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa proses pengadaan barang/jasa harus dengan Pejabat Pengadaan yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dengan kebijakan ini semua jenis pengadaan selalu dikomunikasikan dengan pejabat pengadaan terkait. Dengan demikian maka semua jenis pengadaan akan terpantau dan terencana dengan baik termasuk perencanaan waktu, anggaran, dan spesifikasi teknis.

- Pengumuman dan Pemilihan Penyedia

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui pejabat pengadaan membantu Kemantren Kotagede untuk melakukan pengumuman pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- Penyusunan Kontrak

  Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan kontrak antara Kemantren Kotagede dengan penyedia barang/jasa

yang terpilih, termasuk pengaturan mengenai jangka waktu, pembayaran dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

- Pengawasan Pelaksanaan Kontrak dan pembinaan teknis Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa, termasuk memastikan bahwa barang/jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak

e. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Kotagede, adapun irisan peranan Bagian organisasi adalah :

- Melakukan pemetaan analisa jabatan dan beban kerja masing-masing jabatan di Kemantren Kotagede, hal ini berkaitan dengan jumlah personil di masing-masing jabatan dan standar kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan sehingga SDM yang ditempatkan dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan target organisasi.
- Bagian Organisasi juga berperan untuk menganalisa dan melakukan kajian struktur organisasi Kemantren dan kelurahan yang efektif dan efisien bagi Kemantren Kotagede agar optimal dalam memberikan pelayanan publik.
- Dukungan penyusunan Perjanjian Kinerja, LKIP, mengatur Tata Naskah Dinas, mengatur Pakaian Dinas.

f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki irisan peran dalam mewujudkan capaian reformasi biroktasi di Kemantren Kotagede yaitu pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Kemantren Kotagede Dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Kearsipan diharapkan Kemantren Kotagede mampu menyelenggrakan penataan dan pemeliharaan arsip statis maupun arsip dinamis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

g. Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Persandian (Dinas Kominfosandi)

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam mendukung ketugasan Kemantren Kotagede. Berikut adalah beberapa peran Dinkominfo bagi Kemantren Kotagede :

- Pengembangan Aplikasi dan Solusi Teknologi

  Selama ini Dinkominfosan mensuport pelaksanaan ketugasan Kemantren Kotagede dengan selalu mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung kegiatan operasional Kemantren Kotagede , seperti SIMONEVA, SIMPEG, SIM Pelayanan dsb. Dengan memainkan peran tersebut,

Dinkominfo membantu memastikan bahwa Kemantren Kotagede dapat memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.

- Dukungan penilaian Indeks Pembangunan Statistis Kemantren Kotagede

h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta (BKPSDM) memiliki peran yang penting dalam mendukung Kemanatren Kotagede dalam penberdayaan dan pengelolaan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Berikut adalah beberapa irisan peran BKPSDM yang mensupport ketugasan Kemantren Kotagede :

- Penyediaan Sumber Daya manusia melalui pengadaan dan penempatan personil sesuai Anjab Kemantren Kotagede Penempatan personil yang sesuai dengan kompetensi jabatan oleh BKPSDM sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kewilayahan, dengan personil yang kompeten maka Kemantren Kotagede dapat melaksakan tugas secara optimal.
- Pengembangan SDM
  BKPSDM telah memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan maupun bimtek baik secra adaring maupun luring, hal ini untuk dapat meningkatkan wawasan pegawai baik yang bersifat teknis maupun manajerial guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.
- Evaluasi Kinerja Pegawai
  BKPSDM berperan dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di kemantren Kotagede.
- Penyusunan Kebijakan Kepegawaian
  BKPSDM berperan memberikan kebijakan kepegawaian yang berlaku di Kemantren Kotagede antara lain kebijakan terkait promosi, mutasi, penghargaan, dan sanksi bagi pegawai, serta sistem insentif kinerja.
- Pembinaan Pegawai
  BKPSDM membantu Kemantren Kotagede dalam pembinaan karier maupun dalam penganganan kasus/ permasalahan kepegawaian melalui pendampingan konseling maupun pembinaan administratif dan sanksi

3.3 Strategi Kemantren Kotagede dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 yaitu membangun “Msyarakat Adil Makmur,Lestari dan Berkeadaban”

memerlukan strategi dan arah kebijakan Pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program Pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Kotagede menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Kotagede mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Kotagede. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Kotagede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.3.1 Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. RPJMD 2025- 2029 merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta selama dua dekade mendatang. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD 2025-2029 tidak hanya menggambarkan langkah konkret dalam pencapaian tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi fondasi yang akan memastikan kelancaran transisi menuju fase-fase berikutnya, yang mencakup

akselerasi, ekspansi, dan pencapaian visi pembangunan. Keberhasilan tahap awal ini akan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi pemerintah kota dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini, diharapkan dapat tercapai secara utuh visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah. Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

(i) Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan;

(ii) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik;

(iii) Akselerasi Pembangunan Prioritas;

(iv) Pembangunan terintegrasi dan Berkelanjutan; dan

(v) Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tabel 3.3 Penahapan Rentra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap II (2028)	Tahap II (2029)	Tahap II (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan telah. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban".

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan

terwujudnya visi "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema “Akselerasi Pembangunan” guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kota Yogyakarta dipandang sebagai Rancangan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta menuju “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

3.3.2 Lokus Renstra Perangkat Daerah

Pada periode 2025–2029, Kemantren Kotagede difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kemantren Kotagede pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan.

3.3.3 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Arah kebijakan dalam Renstra Kemantren Kotagede 2025-2029 selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari misi dan aspek strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	Peningkatan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatkan Peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan	
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kemantren	Meningkatksan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatkan sinergitas *stakeholder* penyelenggaraan pemerintahan tingkat kemantren	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Penyusunan program pembangunan juga mepertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran dapat realistis dan berkelanjutan. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan.Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sedangkan Program internal menggunakan penyeragaman program internal Perangkat Daerah. Program yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
   1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan
   3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum**
   1) **Koordinasi** Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
6. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**
   1) Adat , Seni Tradisi dan Lembaga budaya
7. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan**
   1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

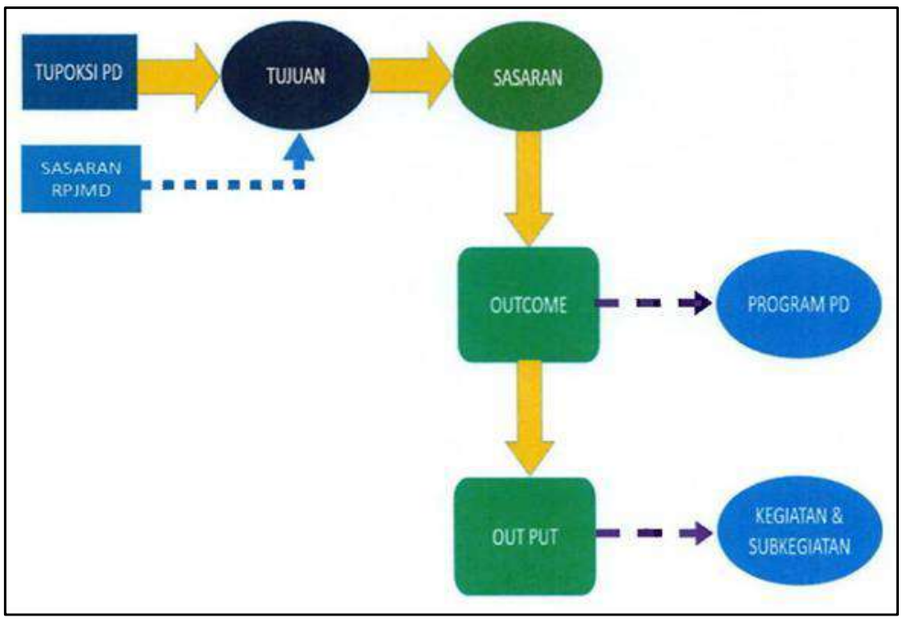

Berdasarkan kerangka diatas,Teknik Merumuskan program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede				Indeks pembangunan Kemantren Kotagede		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
				Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kotagede	Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
						7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede		Nilai Sakip Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Nilai IKM Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Kotagede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Rentra Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

TABEL 4.2
CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.4.01.2.22.09.0000 - Kemantren Kotagede							
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede				Indeks pembangunan Kemantren Kotagede		
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Kotagede)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Rejowinangun)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Prenggan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Purbayan)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Kotagede)		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Rejowinangun)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Prenggan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Panembahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Purbayan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Patehan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kemantren Kotagede)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Rejowinangun)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Prenggan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Prenggan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (Kelurahan Purbayan)	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kelurahan Purbayan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Pelayanan Umum Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan PUrbayan		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Purbayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun di Kelurahan Purbayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Peran Serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kotagede		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Operasi Ketertiban		7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede		Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede		
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Kotagede		Nilai Sakip Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Kemantren Kotagede	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Kotagede sesuai dengan tabel berikut ini :

TABEL 4.3
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada Kemantren Kotagede	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pelestarian adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		

Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Prenggan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Purbayan)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kelurahan Rejowinangun)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		

4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan keistimewaan (Kemantren Kotagede)	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persentase)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01 - KECAMATAN				11.323.824.908		11.554.144.003		11.847.409.673		12.169.489.146		12.588.550.370		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.836.092.720		6.975.134.316		7.152.176.202		7.346.612.725		7.599.596.271		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede	Nilai IKM Kemantren Kotagede (Nilai)	91,2	91,25	6.836.092.720	91,25	6.975.134.316	91,3	7.152.176.202	91,3	7.346.612.725	91,3	7.599.596.271	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	

	Nilai SPIP Kemantren Kotagede (Nilai)	4,344	4.344-4.500		4.345-4.500		4.345-4.500		4.346-4.500		4.346-4.500			
	Nilai Sakip Kemantren Kotagede (Nilai)	A	A		A		A		A		A			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.990.000		10.193.197		10.451.900		10.736.087		11.105.838		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	9.990.000	2	10.193.197	2	10.451.900	2	10.736.087	2	11.105.838		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.340.000		2.387.597		2.448.193		2.514.759		2.601.367		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.340.000	4	2.387.597	4	2.448.193	4	2.514.759	4	2.601.367		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	660.000	1	673.424	1	690.516	1	709.291	1	733.719		

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	660.000	1	673.424	1	690.516	1	709.291	1	733.719		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	660.000	1	673.424	1	690.516	1	709.291	1	733.719		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.690.000		3.765.055		3.860.612		3.965.582		4.102.156		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	3.690.000	4	3.765.055	4	3.860.612	4	3.965.582	4	4.102.156		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.320.000		1.346.849		1.381.031		1.418.582		1.467.439		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.320.000	4	1.346.849	4	1.381.031	4	1.418.582	4	1.467.439		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.657.329.999		4.752.052.584		4.872.681.179		5.005.117.784		5.177.438.057		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	4.657.329.999	12	4.752.052.584	12	4.872.681.179	12	5.005.117.784	12	5.177.438.057		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33		33		33		33		33			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.651.049.999		4.745.644.848		4.866.110.815		4.998.368.771		5.170.456.608		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33	4.651.049.999	33	4.745.644.848	33	4.866.110.815	33	4.998.368.771	33	5.170.456.608		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.070.000		2.112.104		2.165.709		2.224.595		2.301.210		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2.070.000	12	2.112.104	12	2.165.709	12	2.224.595	12	2.301.210		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				1.320.000		1.346.849		1.381.032		1.418.582		1.467.438		

SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1.320.000	12	1.346.849	12	1.381.032	12	1.418.582	12	1.467.438		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				690.000		704.035		721.903		741.532		767.070		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	690.000	1	704.035	1	721.903	1	741.532	1	767.070		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	220.000	2	224.475	2	230.172	2	236.430	2	244.573		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.650.000		1.683.561		1.726.290		1.773.228		1.834.298		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	1.650.000	18	1.683.561	18	1.726.290	18	1.773.228	18	1.834.298		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	330.000	1	336.712	1	345.258	1	354.646	1	366.860		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.980.000		2.020.273		2.071.548		2.127.873		2.201.157		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	24	2	1.980.000	2	2.020.273	2	2.071.548	2	2.127.873	2	2.201.157		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	214	214		1		1		1		1			

	(Dokumen)													
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	330.000	3	336.712	3	345.258	3	354.646	3	366.860		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	214	214	330.000	1	336.712	1	345.258	1	354.646	1	366.860		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	24	2	330.000	2	336.712	2	345.258	2	354.646	2	366.860		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	330.000	12	336.712	12	345.258	12	354.646	12	366.860		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				330.000		336.712		345.258		354.646		366.860		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	330.000	12	336.712	12	345.258	12	354.646	12	366.860		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				330.000		336.713		345.258		354.643		366.857		

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	330.000	12	336.713	12	345.258	12	354.643	12	366.857		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.452.000		1.481.534		1.519.135		1.560.440		1.614.182		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1.452.000	0	1.481.534	0	1.519.135	0	1.560.440	0	1.614.182		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.452.000		1.481.534		1.519.135		1.560.440		1.614.182		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	1.452.000	4	1.481.534	4	1.519.135	4	1.560.440	4	1.614.182		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				382.139.120		389.911.830		399.807.792		410.678.566		424.822.336		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	382.139.120	4	389.911.830	4	399.807.792	4	410.678.566	4	424.822.336		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.946.500		21.372.552		21.914.987		22.510.856		23.286.130		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.946.500	4	21.372.552	4	21.914.987	4	22.510.856	4	23.286.130		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				143.683.420		146.605.941		150.326.800		154.414.185		159.732.210		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	143.683.420	4	146.605.941	4	150.326.800	4	154.414.185	4	159.732.210		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				87.874.200		89.661.561		91.937.172		94.436.943		97.689.352		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	87.874.200	4	89.661.561	4	91.937.172	4	94.436.943	4	97.689.352		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.575.000		41.400.296		42.451.035		43.605.279		45.107.043		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	40.575.000	5	41.400.296	5	42.451.035	5	43.605.279	5	45.107.043		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.060.000		90.871.480		93.177.798		95.711.303		99.007.601		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	89.060.000	12	90.871.480	12	93.177.798	12	95.711.303	12	99.007.601		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				223.218.951		227.759.224		233.539.754		239.889.699		248.151.501		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67	67	223.218.951	67	227.759.224	67	233.539.754	67	239.889.699	67	248.151.501		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	81	81		81		81		81		81			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				57.940.000		59.118.500		60.618.927		62.267.156		64.411.637		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67	67	57.940.000	67	59.118.500	67	60.618.927	67	62.267.156	67	64.411.637		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				165.278.951		168.640.724		172.920.827		177.622.543		183.739.864		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	81	81	165.278.951	81	168.640.724	81	172.920.827	81	177.622.543	81	183.739.864		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.177.854.400		1.201.811.958		1.232.313.946		1.265.820.562		1.309.415.422		

Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	64	12	1.177.854.400	12	1.201.811.958	12	1.232.313.946	12	1.265.820.562	12	1.309.415.422		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.300.000		4.387.462		4.498.816		4.621.139		4.780.291		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	12	4.300.000	12	4.387.462	12	4.498.816	12	4.621.139	12	4.780.291		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211.200.000		215.495.808		220.965.092		226.973.132		234.790.087		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12	211.200.000	12	215.495.808	12	220.965.092	12	226.973.132	12	234.790.087		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				962.354.400		981.928.688		1.006.850.038		1.034.226.291		1.069.845.044		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	64	12	962.354.400	12	981.928.688	12	1.006.850.038	12	1.034.226.291	12	1.069.845.044		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382.128.250		389.903.716		399.790.948		410.681.714		424.847.778		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Kotagede	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	1	382.128.250	1	389.903.716	1	399.790.948	1	410.681.714	1	424.847.778		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	21		21		21		21		21			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75	75		75		75		75		75			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.265.000		24.758.550		25.386.922		26.077.193		26.975.291		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	1	24.265.000	1	24.758.550	1	25.386.922	1	26.077.193	1	26.975.291		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.136.250		92.989.961		95.350.047		97.942.614		101.315.758		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	21	91.136.250	21	92.989.961	21	95.350.047	21	97.942.614	21	101.315.758		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				9.725.000		9.922.807		10.174.647		10.451.296		10.811.239		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75	75	9.725.000	75	9.922.807	75	10.174.647	75	10.451.296	75	10.811.239		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.852.000		72.293.130		74.127.929		76.143.468		78.765.848		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	70.852.000	18	72.293.130	18	74.127.929	18	76.143.468	18	78.765.848		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				186.150.000		189.939.268		194.751.403		200.067.143		206.979.642		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	186.150.000	4	189.939.268	4	194.751.403	4	200.067.143	4	206.979.642		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				93.173.500		95.068.587		97.481.605		100.131.705		103.579.780		
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan (Poin)	115	115,33	93.173.500	116	95.068.587	116,33	97.481.605	116,67	100.131.705	117	103.579.780	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				14.950.000		15.254.083		15.641.232		16.066.517		16.619.848		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	4	14.950.000	4	15.254.083	4	15.641.232	4	16.066.517	4	16.619.848		

7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				14.950.000		15.254.083		15.641.232		16.066.517		16.619.848		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	4	14.950.000	4	15.254.083	4	15.641.232	4	16.066.517	4	16.619.848		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				78.223.500		79.814.504		81.840.373		84.065.188		86.959.932		
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	66	66	78.223.500	66	79.814.504	66	81.840.373	66	84.065.188	66	86.959.932		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.285.000		5.392.497		5.529.358		5.679.702		5.875.311		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	9	9	5.285.000	9	5.392.497	9	5.529.358	9	5.679.702	9	5.875.311		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				72.938.500		74.422.007		76.311.015		78.385.486		81.084.621		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	66	66	72.938.500	66	74.422.007	66	76.311.015	66	78.385.486	66	81.084.621		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.138.216.688		4.222.385.274		4.329.557.266		4.447.259.073		4.600.402.218		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	1.180.567.950	194,33	1.204.580.702	194,67	1.235.152.960	194,67	1.268.736.769	194,67	1.312.432.064	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.759.555.368		3.836.024.725		3.933.383.031		4.040.331.715		4.179.480.741		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	167	177	526.310.200	177	537.015.349	177	550.644.799	177	565.616.831	177	585.096.675		

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				526.310.200		537.015.349		550.644.799		565.616.831		585.096.675		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	167	177	526.310.200	177	537.015.349	177	550.644.799	177	565.616.831	177	585.096.675		
Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	185	66	654.257.750	66	667.565.353	66	684.508.161	66	703.119.938	66	727.335.389		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				654.257.750		667.565.353		684.508.161		703.119.938		727.335.389		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	185	66	654.257.750	66	667.565.353	66	684.508.161	66	703.119.938	66	727.335.389		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	1.118.073.534	194,33	1.140.815.150	194,67	1.169.769.038	194,67	1.201.575.058	194,67	1.242.957.303		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.759.555.368		3.836.024.725		3.933.383.031		4.040.331.715		4.179.480.741		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	200	184	581.520.000	184	593.348.117	184	608.407.292	184	624.949.886	184	646.473.160		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				581.520.000		593.348.117		608.407.292		624.949.886		646.473.160		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	200	184	581.520.000	184	593.348.117	184	608.407.292	184	624.949.886	184	646.473.160		
Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	775	254	536.553.534	254	547.467.033	254	561.361.746	254	576.625.172	254	596.484.143		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				536.553.534		547.467.033		561.361.746		576.625.172		596.484.143		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	775	254	536.553.534	254	547.467.033	254	561.361.746	254	576.625.172	254	596.484.143		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	1.436.526.384	194,33	1.465.745.331	194,67	1.502.945.947	194,67	1.543.811.047	194,67	1.596.979.900		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.759.555.368		3.836.024.725		3.933.383.031		4.040.331.715		4.179.480.741		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	158	160	466.025.500	160	475.504.459	160	487.572.762	160	500.829.865	160	518.078.446		

	Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				466.025.500		475.504.459		487.572.762		500.829.865		518.078.446		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	158	160	466.025.500	160	475.504.459	160	487.572.762	160	500.829.865	160	518.078.446		
Meningkatnya sarana prasarana kewilayahan terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	515	26	970.500.884	26	990.240.872	26	1.015.373.185	26	1.042.981.182	26	1.078.901.454		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				970.500.884		990.240.872		1.015.373.185		1.042.981.182		1.078.901.454		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	515	26	970.500.884	26	990.240.872	26	1.015.373.185	26	1.042.981.182	26	1.078.901.454		
Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan (Poin)	194,33	194,33	403.048.820	194,33	411.244.091	194,67	421.689.321	194,67	433.136.199	194,67	448.032.951		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				177.660.000		181.273.604		185.874.328		190.928.251		197.503.820		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	69	69	177.660.000	69	181.273.604	69	185.874.328	69	190.928.251	69	197.503.820		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				177.660.000		181.273.604		185.874.328		190.928.251		197.503.820		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	69	69	177.660.000	69	181.273.604	69	185.874.328	69	190.928.251	69	197.503.820		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.759.555.368		3.836.024.725		3.933.383.031		4.040.331.715		4.179.480.741		
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	217	217	24.387.500	217	24.883.542	217	25.515.086	217	26.208.841	217	27.111.474		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23.067.500		23.536.693		24.134.054		24.790.259		25.644.036		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	217	217	23.067.500	217	23.536.693	217	24.134.054	217	24.790.259	217	25.644.036		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				1.320.000		1.346.849		1.381.032		1.418.582		1.467.438		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	1.320.000	1	1.346.849	1	1.381.032	1	1.418.582	1	1.467.438		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				124.065.500		126.588.992		129.801.821		133.331.132		137.923.057		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	6	80.819.000	6	82.462.858	6	84.555.766	6	86.854.837	6	89.846.118		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				80.819.000		82.462.858		84.555.766		86.854.837		89.846.118		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	6	80.819.000	6	82.462.858	6	84.555.766	6	86.854.837	6	89.846.118		
Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	43.246.500	0	44.126.134	0	45.246.055	0	46.476.295	0	48.076.939		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	10		10		10		10		10			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				43.246.500		44.126.134		45.246.055		46.476.295		48.076.939		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	10	43.246.500	10	44.126.134	10	45.246.055	10	46.476.295	10	48.076.939		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				76.935.820		78.497.953		80.498.086		82.667.975		85.494.600		
Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	90	19.630.820	90	20.030.111	90	20.538.475	90	21.096.916	90	21.823.494		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0		0		0		0		0			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				19.630.820		20.030.111		20.538.475		21.096.916		21.823.494		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	90	19.630.820	90	20.030.111	90	20.538.475	90	21.096.916	90	21.823.494		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	120	120	2.695.000	120	2.747.075	120	2.824.651	120	2.882.599	120	2.961.415		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				2.695.000		2.747.075		2.824.651		2.882.599		2.961.415		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	120	120	2.695.000	120	2.747.075	120	2.824.651	120	2.882.599	120	2.961.415		
Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	150	565	54.610.000	565	55.720.767	565	57.134.960	565	58.688.460	565	60.709.691		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				54.610.000		55.720.767		57.134.960		58.688.460		60.709.691		

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	150	565	54.610.000	565	55.720.767	565	57.134.960	565	58.688.460	565	60.709.691		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				219.902.000		224.374.661		230.069.707		236.324.301		244.462.222		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kotagede				219.902.000		224.374.661		230.069.707		236.324.301		244.462.222	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				219.902.000		224.374.661		230.069.707		236.324.301		244.462.222		
Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada				0		0		0		0		0		
Meningkatnya operasi ketertiban	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	42	41	219.902.000	41	224.374.661	41	230.069.707	41	236.324.301	41	244.462.222		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				219.902.000		224.374.661		230.069.707		236.324.301		244.462.222		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	42	41	219.902.000	41	224.374.661	41	230.069.707	41	236.324.301	41	244.462.222		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				36.440.000		37.181.165		38.124.893		39.161.342		40.509.879		

Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	36.440.000	100	37.181.165	100	38.124.893	100	39.161.342	100	40.509.879	7.01.4.01.2.22.14.0000 - Kemantren Kotagede	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				36.440.000		37.181.165		38.124.893		39.161.342		40.509.879		
Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	480	485	16.790.000	485	17.131.509	485	17.566.306	485	18.043.934	485	18.665.367		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				16.790.000		17.131.509		17.566.306		18.043.934		18.665.367		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	480	485	16.790.000	485	17.131.509	485	17.566.306	485	18.043.934	485	18.665.367		
Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	19.650.000	1	20.049.656	1	20.558.587	1	21.117.408	1	21.844.512		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.650.000		20.049.656		20.558.587		21.117.408		21.844.512		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	19.650.000	1	20.049.656	1	20.558.587	1	21.117.408	1	21.844.512		

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang mendukung Program dan Kegiatan Renstra Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
     - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
     - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)
     - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)
     - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Prenggan)
     - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Prenggan)
     - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purbayan)
     - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purbayan)

   - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan:
     - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
     - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
     - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, terdiri 1 sub kegiatan:
     - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja

g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan Ketatalaksanaan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
     - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren)
     - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)
     - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Prenggan)
     - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Purbayan)

Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis dari Wali Kota terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi-Misi calon kepala daerah di KPUD, meliputi:

- Meningkatkan derajat pendidikaan warga, melalui program uggulan:
- Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
- Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
- Penumbuhan Wirausaha Muda
- Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program uggulan:
- Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
- Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
- Satu Kampung Satu Bidan

- Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program uggulan:
- Bela Beli Produk Warga
- Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
- Modernisasi Pasar Tradisional.
- Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
- Revitalisasi Kampung Wisata
- Ekonomi Olahraga; dan
- Penguatan akses pendanaan pembangunan
- Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program uggulan:
- ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
- Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
- Perlindungan Hukum bagi Warga
- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:
- Bapak Asuh Keluarga Miskin
- Kampung Layak Huni
- Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
- Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program uggulan:
- Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
- Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
- Mengembangkan tata ruang keistimewaan
- Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
- Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
- Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
- Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
- Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
- Jogja Tangguh Bencana
- Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Kemantren Kotagede mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 -	

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Prenggan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Kotagede	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	

			Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kotagede	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKU berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 tetap berlaku, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian IKU beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET TAHUN**						**KETERANGAN**
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.4.01.2.22.07 .0000 - Kemantren Kotagede									
2.	Indeks pembangunan Kemantren Kotagede	Poin	521,57	521,57	521,60	521,77	521,80	521,82	521,83	
3.	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Poin	407,47	407,47	402,50	402,70	402,73	402,75	402,77	
4.	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Kotagede	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	

1) Indeks pembangunan Kemantren Kotagede

Indeks pembangunan Kemantren Kotagede merupakan indikator kinerja dari tujuan OPD yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede. Target diperoleh dari perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren.

Evaluasi kinerja kemantren dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan berasaskan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan sinergisitas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan

kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kemantren. Sasaran Evaluasi Kinerja Kemantren meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.
Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan tahapan:

a. sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren;
b. penilaian verifikasi data dukung oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
   penyampaian presentasi data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Mantri Pamong Praja;
c. verifikasi dan klarifikasi lapangan data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
d. penyampaian hasil Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
e. penetapan Kemantren terbaik; dan
f. pengumuman Kemantren terbaik.

Penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren dilakukan dengan indikator penilaian yang meliputi aspek:

a. penyelenggaraan atributif;
b. penyelenggaraan tugas delegatif;
c. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum;
d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
e. tata kelola pemerintahan; dan/atau
f. inovasi, prestasi dan penghargaan.

1.1.) Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede. Target diperoleh dari perhitungan Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Nilai evaluasi perkembangan pembangunan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mengetahui tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan
   a. Pemerintahan Kelurahan;
   b. Kinerja;
   c. Inisiatif dan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat;
   b. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government; dan

c. Pelestarian adat dan budaya.

2) Bidang Kewilayahan
   a. Identitas desa dan kelurahan;
   b. Batas;
   c. Inovasi;
   d. Tanggap dan siaga bencana; dan
   e. Pengaturan investasi.

3) Bidang Kemasyarakatan
   a. Partisipasi masyarakat;
   b. Lembaga Kemasyarakatan;
   c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
   d. Keamanan dan ketertiban;
   e. Pendidikan;
   f. Kesehatan;
   g. Ekonomi;
   h. Penanggulangan kemiskinan; dan
   i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

1.2.) Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede

Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede merupakan indikator kinerja dari sasaran OPD yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Kotagede yang Baik dan Adaptif. Target diperoleh dari perhitungan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) parameter penilaian yaitu :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

4) Indeks Kepuasan Masyarakat
5) Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP
6) Indeks Profesionalitas (IP) ASN
7) Penilaian Pengawasan Arsip Internal
8) Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

Perangkat Daerah/ Unit Kerja leading sector melaksanakan penilaian terhadap parameter yang telah ditetapkan berdasar Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya. Mekanisme yang digunakan oleh Perangkat Daerah leading sector dalam melaksanakan masing-masing parameter penilaian mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian dari Perangkat Daerah leading sector disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir Oktober. Evaluator internal menyusun Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah kepada Wali Kota Yogyakarta dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta paling lambat bulan November.

Evaluator internal melakukan pembobotan atas hasil penilaian pada 8 (delapan) parameter. Hasil pembobotan menjadi nilai RB level Perangkat Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kategori dan Predikat Nilai Reformasi Birokrasi

No.	Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 – 100	AA	Istimewa
2.	>80 – 90	A	Sangat Baik
3.	>70 – 80	BB	Baik
4.	>60 – 70	B	Cukup Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup
6.	>30 – 50	C	Buruk
7.	>0 – 30	D	Sangat Buruk

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Kotagede disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Kemantren Kotagede pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029. Renstra juga sebagai pedoman bagi para fasilitator Pembangunan agar dapat melaksanakan Pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahun dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditentukan pada saat merumuskan Rencana strategis Instansi.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Rencana Strategis Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029 menjadi instrument Pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban.

Lampiran :

1. Pohon Kinerja Kemantren Kotagede
2. Cascading Kemantren Kotagede
3. Data Kinerja (Metadata Renstra) Kemantren Kotagede

PEMDA KOMDUS KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2029

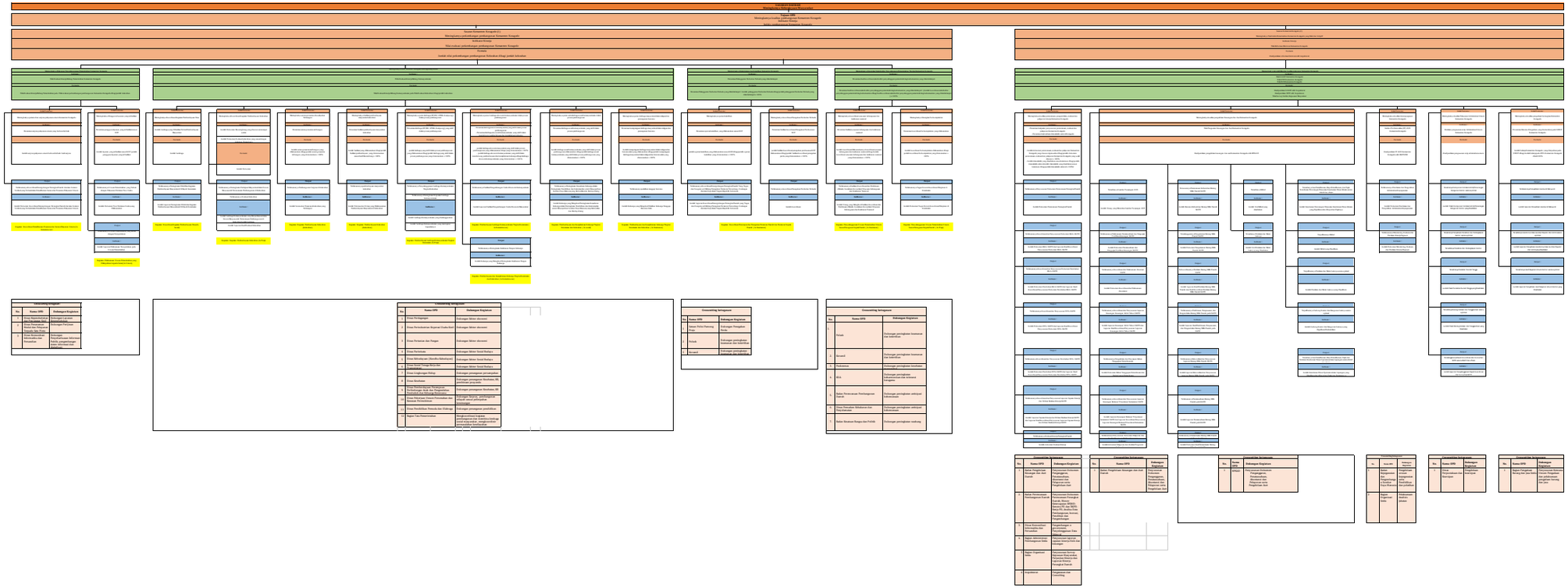
KADIPATEN KOTAGEDE
Mewujudkan Kadipaten Kotagede yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
Kepala Desa
Mewujudkan pelayanan pemerintahan Kelurahan Kotagede yang efektif dan efisien
Sekretaris Desa
Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan Kelurahan Kotagede
Kasi Pemerintahan
Meningkatkan pelayanan pemerintahan Kelurahan Kotagede
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kotagede
Kasi Pelayanan
Meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Kotagede
Kaur Umum dan Keuangan
Mengelola administrasi umum dan keuangan Kelurahan Kotagede
Kaur Perencanaan
Menyusun rencana pembangunan Kelurahan Kotagede
Kaur Tata Usaha dan Umum
Mengelola administrasi umum dan kearsipan Kelurahan Kotagede
Kaur Keuangan
Mengelola keuangan Kelurahan Kotagede
Kaur Perencanaan
Menyusun rencana pembangunan Kelurahan Kotagede
Kaur Kesra
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kotagede
Kaur Pemberdayaan Masyarakat
Memberdayakan masyarakat Kelurahan Kotagede
Kaur Pelayanan
Meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Kotagede
Kasi Pemerintahan
Meningkatkan pemerintahan di Kelurahan Kotagede
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kotagede
Kasi Pelayanan
Meningkatkan pelayanan publik di

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target						Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Pengampu	Target						Sub Kegiatan	Sasaran Operasional (Sub Output)	Indikator Kinerja (Sub Output)	Pengampu	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030							2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kemantren Kotagede	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede	Indeks pembangunan Kemantren Kotagede	80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	521,557	521,560	521,777	521,780	521,782	521,783	Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Kotagede yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat	A (89,5 47-90,000)	A (89,5 47-90,000)	A (89,5 47-90,000)	A (89,5 47-90,000)	A (89,5 47-90,000)	A (89,5 47-90,000)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede	Nilai SAKIP Kemantren Kotagede	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (86,701-86,71)	A (86,712-86,72)	A (86,723-86,73)	A (86,733-86,74)	A (86,734-86,74)	A (86,734-86,74)	Mantri Anom	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Kotagede	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang wajib disusun x 100%	Sub Bagian Keuangan dan PEP	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bagian Keuangan dan PEP	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
																							- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Terkelola dan Terukur (4,344-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,344-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,345-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,345-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,346-4,500)	Terkelola dan Terukur (4,346-4,500)				Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Kotagede	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%	Sub Bagian Keuangan dan PEP	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																							- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	91,20	91,25	91,25	91,30	91,30	91,30																	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Bagian Keuangan dan PEP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																																													Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Sub Bagian Keuangan dan PEP	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

KOMARU MA'ARIF SIP,MSI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197205181992031003

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	2030	Persetujuan	Catatan
												Target	Target	Target	Target	Target		Target		
1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan						Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	Poin	115,00	115,00	115,33	116,00	116,33	116,67	116,67	117,00		
									Sumber data:											
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Rejowinangun	Poin	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00		
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prenggan	Poin	112,00	112,00	113,00	114,00	115,00	116,00	116,00	117,00		
									Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purbayan	Poin	116,00	116,00	116,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00		
									Jumlah kelurahan	Kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3		
					1.1.1.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kotagede	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	Sarpras pelayanan umum yang menjadi kewenangan kemantren yang masuk dalam Perwal Pelimpahan Kewenangan, misalnya ialah : Jalan yang tidak bernomer ruas, SPAH, MCK, SAH, Titik PJU, Cermin Cembung, pos ronda	Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber Data:											
									- Sarpras pelayanan umum berkondisi baik	unit	251									
									- Total Sarpras	unit	251									
					1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP		Dihitung dari jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber Data:											
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	layanan	1.024									
									- Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi	layanan	1.024									
	1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan						Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	194,33	194,33	194,67	195,00	195,33	195,67	195,67	196,00		
									Sumber data:											
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Rejowinangun	Poin	195	195	195	195	196	196	196	196		

									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prenggan	Poin	196	196	196	196	196	196	196	196		
									Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purbayan	Poin	192	192	193	194	194	195	195	196		
									Jumlah kelurahan	kelurahan	3	3	3	3	3	3	3	3		
					1.1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Lembaga	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18		
									Sumber data:											
									Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18		
					1.1.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		Jumlah Dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		
									Sumber data:											
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		
							Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu		Jumlah Dokumen Musrenbang	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4		
									Sumber data:											
									Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4		
					1.1.2.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	Unit	116									berasal dari DPA
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	Unit	116									
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Lembaga	158	158	158	158	158	158	158	158		
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	Lembaga	158	158	158	158	158	158	158	158		

					1.1.2.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :												
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	50										
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	50										
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :												
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan	lembaga	162	162	162	162	162	162	162	162		
									jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	162	162	162	162	162	162	162	162		
					1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun		Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :												
									jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan	unit	85										
									jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan	unit	85										
						Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan		Dihitung dari jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :												
									jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	lembaga	163	163	163	163	163	163	163	163		
									jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang	lembaga	163	163	163	163	163	163	163	163		

					1.1.2.6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :												
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	lembaga	218	218	218	218	218	218	218	218		
									jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	218	218	218	218	218	218	218	218		
						Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:												
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan	Lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4		
									jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan	Lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4		
					1.1.2.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibagi lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:												
									jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4		
									lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan	lembaga	4	4	4	4	4	4	4	4		

						Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:												
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18		
									jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan	lembaga	18	18	18	18	18	18	18	18		
						Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana		Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:												
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan	lembaga	2	2	2	2	2	2	2	2		
									jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan	lembaga	2	2	2	2	2	2	2	2		
	1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:												
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	angka	28	28	29	30	31	32	32	33		
									Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang direncanakan	angka	28	28	29	30	31	32	32	33		

					1.1.3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP		Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data:											
									jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11		
									jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan	dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11		
						Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP		Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan	dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11		
									jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan	dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11		
	1.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti						Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12		
									Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12		

					1.1.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Dihitung dari Jumlah dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		
									jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan		Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Sumber data :											
									Jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	dokumen	7	5	6	6	6	6	6	6		
									jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan	dokumen	7	5	6	6	6	6	6	6		
1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif	1.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede	Nilai Sakip Kemantren Kotagede	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50) D (Nilai >0-30)					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,70)	A (86,70-86,71)	A (86,71-86,72)	A (86,72-86,73)	A (86,72-86,73)	A (86,73-86,74)	A (86,73-86,74)	A (86,73-86,74)		
									Sumber data :											
									Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	A (86,70)									
			Nilai SPIP Kemantren Kotagede						Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500)	Terkelola dan Terukur (4,346 - 4,500)		
									Sumber data :											
									Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,344 - 4,500)									
			Nilai IKM Kemantren Kotagede						Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,20	91,20	91,25	91,25	91,30	91,30	91,30	91,30		
									Sumber data :											

									Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,20											
					1.2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kemantren Kotagede	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang wajib disusun.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
									Sumber data :													
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang disusun tepat waktu	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13			
									jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang wajib disusun	dokumen	13	13	13	13	13	13	13	13			
							Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kotagede		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
									Sumber data :													
									Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			
									jumlah data statistik sektoral	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			
					1.2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Kemantren Kotagede	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede		Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5			
									Sumber data :													
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5										
					1.2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5			
									Sumber data :													
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5										
					1.2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Kemantren Kotagede	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kotagede		Hasil penilaian IP ASN Kemantren Kotagede oleh BKPSDM	Nilai	79,97	79,97	79,97	79,98	79,99	79,99	79,99	79,99			
									Sumber data :													
									Hasil penilaian IP ASN Kemantren Kotagede oleh BKPSDM	Nilai	79,97										
					1.2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Kemantren Kotagede	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kotagede		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	78,89	78,89	78,89	78,90	78,90	78,91	78,91	78,92			
									Sumber data :													

									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	78,89										
					1.2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Kemantren Kotagede	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5			
									Sumber data :												
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5										
					1.2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jas Kemantren Kotagede	Persentase ~~Prosentase~~ Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede		Jumlah belanja Kemantren Kotagede yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Kemantren Kotagede dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			
									Sumber data :												
									Jumlah belanja Kemantren Kotagede yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	6.854										
									Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede	Rupiah	6.854										
					1.2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Kemantren Kotagede	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede		Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5			
									Sumber data :												
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Kemantren Kotagede oleh BPKAD	Nilai	5										

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	2029 Target	Kondisi Akhir	2030 Target	Persetujuan	Catatan
1. Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede	Indeks pembangunan Kemantren Kotagede	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)				80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	Poin	521,57	521,57	521,60	521,77	521,80	521,82	521,82	521,83	#DIV/0!	menggunakan penilaian di SIM evdeskel
						Sumber Data:											
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun	Poin	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00		
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan	Poin	399,90	399,90	400,00	400,00	400,10	400,15	400,15	400,15		
						Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan	Poin	399,50	399,50	399,50	400,10	400,10	400,10	400,10	400,15		
						Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Kotagede	poin	998,00	998,00	998,00	998,05	998,05	998,10	998,10	998,10		
			1.1 Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Poin	402,47	402,47	402,50	402,70	402,73	402,75	402,75	402,77		
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun	Poin	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00		
						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan	Poin	399,90	399,90	400,00	400,00	400,10	400,15	400,15	400,15		

						Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan	Poin	399,50	399,50	399,50	400,10	400,10	400,10	400,10	400,15		
						Jumlah kelurahan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
			1.2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede		Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (89,547)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)	A (89,547-90,000)		
						Sumber data:											
						Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30) Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomer 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomer 9 karena tidak mengamanatkan RB level OPD sehingga disempurnakan dengan Kepwal.	Nilai	A (89,547)	A (89,547-90,000)	A (89,548-90,000)	A (89,549-90,000)	A (89,550-90,000)	A (89,551-90,000)	A (89,551-90,000)	A (89,552-90,000)		

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2025-2029

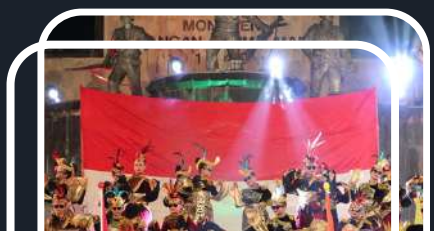

0274-5013885
kesbang.jogjakota.go.id
Jl. Sultan Agung No. 133, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dokumen Recana Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai perkembangan perubahan kebijakan di Kota Yogyakarta.

Demikian Renstra ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Badan

Nipdyo Dewanto, S.H., M.Hum

Pembina Tingkat I IV/b

NIP 197504061998031003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **I**
Kata Pengantar ..... **II**
Daftar Isi ..... **III**
Daftar Tabel ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **5**
2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.4 Kelompok Sasaran dan Penerima Layanan 12
2.5 Permasalahan Perangkat Daerah dan Isu Strategis 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **19**
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 19
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 22

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA **27**
4.1 Uraian Program 27
4.2 Uraian Kegiatan 29
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif 30
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 67
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 68
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 69

BAB V PENUTUP **70**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai.....7
Tabel 2.2 Daftar Jenis Barang.....7
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2020-2024..... 10
Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 18
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra.....20
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....23
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....25
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 25
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah..... 31
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....43
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....67
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.....68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen lima tahunan OPD yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Di sisi lain, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan dasar bagi OPD untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 5 (lima) tahun ke depan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah kebijakan Wali Kota. Dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD, Renstra dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Wali Kota Yogyakarta. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
9) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
10) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
11) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2041;
13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah;
15) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek kesatuan bangsa dan politik dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3.2. Tujuan

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, dan menyajikan kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di samping itu pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, serta Tim Kerja Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Tim Kerja Politik Dalam Negeri dan Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya yaitu:

1. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
6. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
7. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
8. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umatberagama;
9. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
10. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
11. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
12. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan operasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
13. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
14. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
15. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekertariat terdiri dari:
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
    1. Tim Kerja Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
    2. Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatanterdiri dari:
    1. Tim Kerja Politik Dalam Negeri
    2. Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan

Secara skematis Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

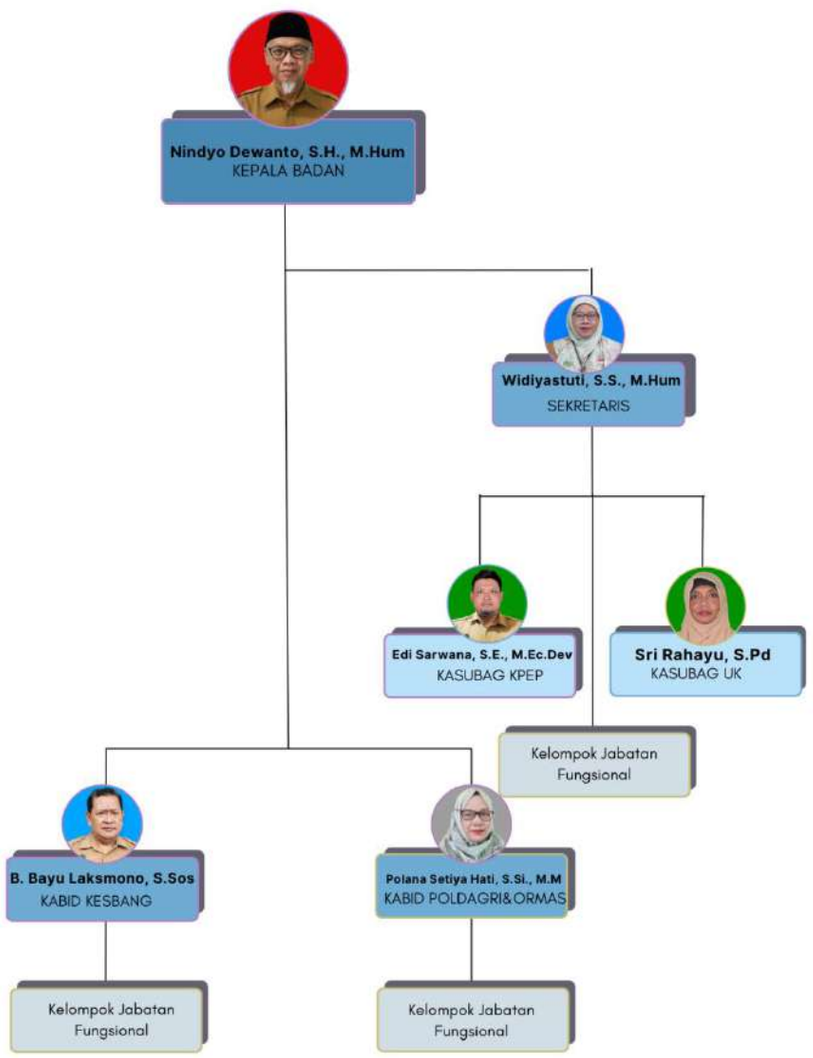

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah orang, terdiri dari: 17 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang berstatus PPPK, 1 orang Tenaga Bantuan dan 5 orang Tenaga Teknis. Sedangkan pengelompokan pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan
Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	**APARATUR SIPIL NEGARA**		
1	Kepala Badan	Pembina Tingkat I IV/B	1 orang
2	Sekretaris	Pembina Tingkat I IV/B	1 orang
3	Kepala Bidang	Pembina IV/A	2 orang
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk I III/D	2 orang
5	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Tk I III/D	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda Tk I III/B Penata Muda III/A Pengatur Tk I II/D Pengatur II/C IX	4 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang
B	**TENAGA BANTUAN**		
1	Tenaga Administrasi Umum	Tenaga Bantuan Tenaga Teknis	1 orang 5 orang

2.2.2. Sarana Prasarana

Tabel 2.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

KODE	NAMA	TOTAL	KONDISI
1.3.02.05.01.0005.010	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
1.3.02.05.01.0005.002	CCTV	1	Baik
1.3.02.05.02.0004.007	Exhause Fan	1	Baik
1.3.02.05.01.0005.033	Laser Pointer	1	Baik
1.3.02.05.02.0006.013	Megaphone	1	Baik
1.3.02.05.01.0001.003	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inci)	1	Baik
1.3.02.01.03.0005.010	Pompa Air	1	Baik
1.3.02.10.02.0003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
1.3.02.02.02.0002.001	Sepeda	1	Baik
1.3.02.05.02.0006.082	Speaker Portable	1	Baik
1.3.02.01.03.0004.003	Stationary Generating Set	1	Baik
1.3.02.10.01.0002.009	Tablet PC	1	Baik
1.3.02.05.02.0006.036	Tangga Aluminium	1	Baik
1.3.02.05.02.0006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Baik
1.3.02.02.02.0001.013	Trolley Barang (Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang)	1	Baik
1.3.02.05.02.0006.058	Vertikal Blind	1	Baik

1.3.02.05.02.0004.000	ALAT PENDINGIN	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.000	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
1.3.02.05.03.0005.006	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
1.3.02.05.02.0001.031	Kursi Tamu	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.028	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
1.3.02.05.02.0003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.014	Microphone	2	Baik
1.3.02.10.02.0003.002	Monitor	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.008	Sound System	2	Baik
1.3.02.05.02.0006.012	Wireless	2	Baik
1.3.02.06.01.0002.126	Camera Digital	3	Baik
1.3.02.05.01.0005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik
1.3.02.05.02.0001.003	Kursi Besi/Metal	3	Baik
1.3.02.05.01.0005.078	Papan Tulis	3	Baik
1.3.02.05.02.0006.002	Televisi	3	Baik
1.3.02.05.02.0007.001	Alat Pemadam/Portable	4	Baik
1.3.02.10.02.0001.012	Hard Disk	4	Baik
1.3.02.05.01.0005.043	LCD Projector/Infocus	4	Baik
1.3.02.05.01.0004.002	Lemari Kayu	4	Baik
1.3.02.10.01.0002.003	Note Book	4	Baik
1.3.02.05.02.0001.005	Sice	4	Baik
1.3.02.02.01.0001.003	Station Wagon	4	Baik
1.3.02.10.01.0002.002	Lap Top	5	Baik
1.3.02.05.02.0006.038	Dispenser	6	Baik
1.3.02.05.02.0002.003	Jam Elektronik	6	Baik
1.3.02.02.01.0004.001	Sepeda Motor	7	Baik
1.3.02.06.02.0001.006	Handy Talky (HT)	8	Baik
1.3.02.05.01.0005.005	White Board	8	Baik
1.3.02.10.02.0003.017	External/ Portable Hardisk	9	Baik
1.3.02.05.02.0004.006	Kipas Angin	12	Baik
1.3.02.05.03.0003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	Baik
1.3.02.10.02.0003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Baik
1.3.02.05.02.0004.003	A.C. Window	15	Baik
1.3.02.05.01.0004.005	Filing Cabinet Besi	20	Baik
1.3.02.05.01.0004.004	Rak Kayu	20	Baik
1.3.02.05.02.0001.008	Meja Rapat	21	Baik
1.3.02.05.02.0006.018	Unit Power Supply/UPS	21	Baik
1.3.02.05.01.0004.003	Rak Besi	22	Baik
1.3.02.05.01.0004.027	Lemari Kaca	23	Baik
1.3.02.05.02.0001.004	Kursi Kayu	24	Baik
1.3.02.05.02.0001.032	Kursi Putar	26	Baik
1.3.02.10.01.0002.001	P.C Unit	28	Baik
1.3.02.05.02.0001.036	Kursi Lipat	38	Baik
1.3.02.05.02.0001.039	Meja Komputer	54	Baik
1.3.02.05.02.0001.030	Kursi Rapat	90	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dirumuskan indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2024

Program PD	Indikator	Formula Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Organisasi Ber SKT yang Aktif	Jumlah Ormas yang Aktif dibagi Jumlah Ormas dikali 100%	Persen	82	82								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	Sarana prasarana yang tercapai dibagi dengan target dikali 100%	Nilai			A	A	A	A				
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai							A	A	A	A
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100%	Persen			75	75	80	81,48				
	Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %	Persen							81	82,19	82	83,62
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	Rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada / Pileg /Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT dikali 100%	Persen			81	81	81	81				
	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah lembaga yang disasar pendidkan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bangkesbangpol Kota YK	Persen			55,7	55,7	61,9	62,54	65	67,85	67	74,34

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta,	Jumlah organisasi teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikali 100%	Persen			44	44	51,5	51,96	55	54	60	71,05
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	Jumlah Satgas Anti NAPZA di SMP dibagi jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%	Persen			75	76	80	93,94				
	Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%	Persen			65	65	70	84,85				
	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100 %	Persen							71	75,45	72	84,03
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaian dibagi dengan konflik sosial yang terjadi dikali 100%	Persen			70	85	75	75,68				
	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%	Persen							76	80,41	77	94,17

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2020-2024 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti:

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan bail oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlihat.
2. Kondusifitas Kota Yogyakarta yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta

2.4. Kelompok Sasaran dan Penerima Layanan

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Yogyakarta dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2018.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

FPK dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 70 Tahun 2019 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Untuk mengatasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2019. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

d) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Yogyakarta, forum ini diketuai Wali Kota Yogyakarta dan beranggotakan Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Yogyakarta.

e) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Yogyakarta

TKD di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Yogyakarta. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/ instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

f) Forum Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Forum P4GN ini dibentuk dengan berdasar Keputusan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2019. Forum ini dibentuk untuk pencapaian tujuan "Indonesia Bebas Narkoba" sesuai Instruksi Presiden Republik Indoesia Nomor 12 Tahun 2011. Forum ini mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan cara menjaring, menampung, menkomunikasikan data dan informasi dari masing-masing lembaga yang berkaitan dengan P4GN, dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

g) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2019. Tim ini mengemban tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tim ini juga mengawasi perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

h) Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta. Dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Yogyakarta, Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk untuk memantau, mengkoordinasikan, merencanakan, mencari, menkomunikasikan informasi mengenai keberadaan orang asing dan ormas asing. Selain itu tim juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Wali Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman orang asing.

i) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Kesbangpol bersinergi dengan KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan mengenai demokrasi dan kepemiluan sebagai bentuk usaha meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum mendatang.

j) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Badan Kesbangpol bersama dengan KPU juga bekerjasama dengan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepemiluan terutama untuk generasi muda, kelompok perempuan, kelompok difabel, marginal dan tokoh masyarakat.

k) Tim Pengawas Terpadu Ormas (TPT Ormas)

TPT Ormas terdiri dari FORKOPIMDA, anggota intelijen kepolisian, Kejaksaan, KODIM dan BIN Kota Yogyakarta, memiliki fungsi dan tugas memonitoring dan memantau ormas-ormas yang aktif berkegiatan atau terlibat aksi. Kemuadian hasil dari pemantauan ormas tersebut dituangkan dalam laporan, dan rapat koordinasi yang diadakan 2 bulan sekali.

l) Masyarakat Kota Yogyakarta secara Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Melalui program-programnya, Kesbangpol aktif mendorong peningkatan wawasan kebangsaan, toleransi antarumat beragama, serta pemahaman ideologi Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Harapannya, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan, mampu menangkal paham radikal, serta lebih aktif dalam kehidupan demokrasi, seperti melalui partisipasi pemilu dan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, kehadiran Kesbangpol secara langsung berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berdaulat.

2.5 Permasalahan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, maka keluaran (ouput) kegiatan yang dihasilkan adalah dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan.

Perencanaan yang disusun berdasarkan pada kondisi umum yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program kegiatan pembangunan. Kondisi umum daerah Kota Yogyakarta saat iini secara makro adalah sebagai bahwa Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia, di mana penduduknya terdapat masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di samping itu, Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, pariwisata dan perjuangan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga di luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk datang di Yogyakarta, khususnya para remaja untuk menuntut ilmu.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan klasik yaitu bertambahnya penduduk khususnya di kalangan pemuda. Hal itu memerlukan perhatian kita bersama serta pemahaman yang mendalam tehadap keberadaan masing-masing baik masyarakat Yogyakarta maupun warga pendatang, sehingga

akan timbul kebersamaan saling menghargai terhadap adat istiadat maupun budaya masing-masing.

Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menghendaki suasana tenteram, damai untuk memunculkan konflik. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat bersinergi dengan instansi lain untuk menurunkan intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial dari tahun ke tahun.

Ada pun kondisi umum daerah secara makro yang dinginkan atau diproyeksikan ke depan adalah meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu arah kebijakan pembangunan adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur, maka diperlukan peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila sesuai yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang rukun, damai, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju dan memiliki moral dan etika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- **Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba**. Pada tahun 2022, DIY menempati posisi ke-6 angka penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia dengan proporsi terbesar dari golongan pelajar.
- **Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Ideologi**. Perkembangan teknologi memudarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri bangsa yang terkait kemerosotan nilai keagamaan, nasionalisme, dan perkembangan moralitas bangsa.
- **Dinamika politik wilayah Kota Yogyakarta berkembang fluktuatif & eskalatif**. Masih adanya polarisasi politik sebagai residu dari kontestasi politik pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dinamika politik nasional juga berdampak pada suhu politik Kota Yogyakarta sehingga mempengaruhi angka partisipasi pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang cenderung menurun.
- **Timbulnya potensi konflik sosial yang disebabkan oleh kemajemukan wilayah Kota Yogyakarta**. Banyaknya kelompok pendatang yang menetap di wilayah Kota Yogyakarta memunculkan kerentanan sosial dan budaya masyarakat. Sampai

saat ini, masih ditemui potensi konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh benturan budaya maupun kondisi sosial ekonomi.

Untuk memahami secara lebih komprehensif tantangan yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta, diperlukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang relevan. Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak secara lokal, namun juga berkaitan erat dengan dinamika nasional maupun global. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara permasalahan umum, isu yang menjadi perhatian perangkat daerah, serta bagaimana isu tersebut mencerminkan konteks nasional, regional, dan global yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah:

Tabel 2.4

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya lembaga pendidikan, forum pelajar, dan program pembinaan remaja oleh Pemda	Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar	Bakesbangpol secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati	Krisis kesehatan mental dan penyalahgunaan zat di kalangan remaja global	Indonesia sebagai negara transit dan tujuan narkoba; meningkatnya penyalahgunaan oleh generasi muda	Kurangnya pengawasan dan edukasi terhadap pelajar terkait bahaya narkoba	Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, dengan DIY menempati posisi ke-6 nasional pada 2022, didominasi oleh pelajar
pembinaan wawasan kebangsaan, kegiatan ormas, dan program bela negara	Menurunnya pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila	Bakesbangpol secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati	Krisis identitas budaya akibat globalisasi dan digitalisasi	Dekadensi moral, menurunnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan muda	Lemahnya internalisasi nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan keluarga	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai ideologi Pancasila, dipicu oleh perkembangan teknologi dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa
Kapasitas Pemda dalam fasilitasi pendidikan politik, dialog publik, dan penguatan demokrasi lokal	Polarisasi dan dinamika politik lokal	Bakesbangpol secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati	Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi	Polarisasi pasca pemilu, konflik horizontal, apatisme politik di masyarakat	Kurangnya literasi politik dan partisipasi publik	Dinamika politik wilayah Kota Yogyakarta yang fluktuatif & eskalatif pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Kewenangan Kesbangpol dalam memfasilitasi integrasi sosial, forum kerukunan, dan pembinaan ormas	Potensi konflik sosial akibat kemajemukan masyarakat	Bakesbangpol secara langsung tidak berkaitan dengan 7 (tujuh) isu KLHS yang disepakati	Ketegangan antarbudaya dan konflik etnis di kawasan urban multikultural	Potensi konflik sosial di daerah heterogen, terutama di kota pendidikan seperti Yogyakarta	Minimnya forum dialog antar komunitas dan kesenjangan sosial ekonomi	Timbulnya potensi konflik sosial akibat kemajemukan dan benturan budaya serta sosial ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

VISI	**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**
MISI 1	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
MISI 3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
MISI 4	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
MISI 5	Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta melaksanakan misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945. Kemudian Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu

yaitu Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat, dan Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Rancangan Akhir Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
- Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat		Jumlah potensi konflik sosialyang terjadi (Nilai)	209	205	200	195	190	185	180	
		Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial (%)	86,6	86,83	87	87,18	87,37	87,57	88,33	
		Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan untuk menjaga kondusivitas Kota Yogyakarta melalui kebijakan publik yang berfokus pada pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial serta penguatan keterbukaan informasi publik. Posisi strategis Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata menjadikannya wilayah yang sangat heterogen, sehingga memerlukan strategi khusus yang inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Arah kebijakan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas deteksi dini, pembinaan wawasan kebangsaan, serta optimalisasi layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Dengan meningkatnya transparansi dan menurunnya angka konflik sosial,

kondusivitas daerah dapat terjaga, sehingga mendukung terciptanya kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan kota.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja Dinas Sosial yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Desain pohon kinerja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 akan dilampirkan pada akhir dokumen ini.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, yaitu “Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat” dan “Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah
6. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan

Berdasarkan strategi yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dirumuskan kebijakan yang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala

2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala
3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala
4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala
5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala
6. Menyusun Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Mengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Mengelola Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
9. Mengelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Mengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Mengelola Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12. Mengelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Mengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat 3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi	1. Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Meningkatkan Penyelesaian

		kemasyarakatan 4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah	Potensi Konflik Sosial di Wilayah
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan	6. Menyusun Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Mengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Mengelola Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 9. Mengelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10. Mengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah 11. Mengelola Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12. Mengelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Mengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Penahapan Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Penahapan Renstra PD

Tahap I 2025-2026	Tahap II 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Penguatan fondasi manajemen konflik dan deteksi dini melalui konsolidasi internal dan eksternal	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik.	Penguatan mekanisme kolaboratif antar stakeholder dalam penanganan isu sosial-politik yang berpotensi konflik	Mendorong peran aktif masyarakat dalam merawat harmoni dan mengembangkan model ketahanan sosial berbasis lokal	Evaluasi hasil, perumusan kebijakan berkelanjutan, dan penguatan sistem ketahanan sosial politik.
Konsolidasi manajemen birokrasi, perbaikan sistem kerja dan tata kelola pelayanan publik	Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi berbasis hasil	Transformasi digital dalam mendukung efisiensi kerja dan transparansi pelayanan	Pembangunan budaya kerja profesional dan berorientasi hasil	Konsolidasi capaian reformasi birokrasi dan perumusan perbaikan berkelanjutan

Arah dan kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah melalui penurunan potensi dan kejadian konflik sosial	Peningkatan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat melalui:		
		1. Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat.	
		2. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan	Mendorong partisipasi politik yang sehat melalui pendidikan politik dan penguatan etika serta budaya politik di partai dan lembaga	

		pengembangan etika serta budaya politik	pendidikan.	
		3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan agar berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.	
		4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Memperkuat ketahanan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, sosial, dan budaya	
		5. Meningkatkan penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah	Meningkatkan deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain:

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 Uraian Program

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol didukung oleh program-program berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bukan urusan utama/substantif, melainkan bersifat supporting atau penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten/kota berjalan optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan yang diampu oleh sekretariat yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta pembentukan dan pembinaan Paskibraka serta Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Program ini juga meliputi penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya pembauran antar kelompok sosial, suku, agama, dan budaya, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, inklusif, dan anti diskriminasi.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan memperkuat budaya politik yang demokratis, beretika, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan politik untuk kelompok rentan (perempuan, kaum difabel dan marginal, serta anak sekolah), lomba terkait demokrasi untuk pelajar, Kelas Demokrasi dan Podcast Poldagri.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, legalitas, serta peran konstruktif organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah. Program ini mencakup fasilitasi pendaftaran dan verifikasi Ormas, pembinaan etika organisasi, pemberian edukasi peraturan perundang-undangan, serta pemantauan aktivitas ormas.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik yang berakar pada isu-isu ekonomi untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.Selain penanganan potensi konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya, program ini juga berfokus pada bagaimana upaya memperkuat fondasi masyarakat agar lebih tahan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba. Program ini juga meliputi penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memelihara dan meningkatkan

kerukunan antar umat beragama serta mencegah potensi konflik yang sehingga tercipta suasana damai, toleran, dan harmonis di masyarakat.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan konflik sosial secara efektif dan terkoordinasi. Program ini meliputi penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pemetaan potensi konflik, penyusunan laporan kewaspadaan daerah, peningkatan kapasitas tim terpadu penanganan konflik.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program kerja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta adalah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Ampera, Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2025–2029. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Rancangan Akhir Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat				Jumlah potensi konflik sosialyang terjadi (Nilai)		
		Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat			Persentase penyelesaian potensi konflik sosial (%)		
			Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	

						Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
		Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan			Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nilai)		

		Politik					
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai SAKIP Bakesbangpol (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Bakesbangpol (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Bakesbangpol (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bakesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				aset			
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing- masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				17.609.262.669		17.967.423.402		18.423.470.037		18.924.323.951		19.575.990.610		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.249.573.713		4.336.007.226		4.446.063.157		4.566.932.251		4.724.196.388		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SPIP Bakesbangpol (Nilai)	4,183	4.186-4.5	4.249.573.713	4.187-4.5	4.336.007.226	4.188-4.5	4.446.063.157	4.189-4.5	4.566.932.251	4.190-4.5	4.724.196.388	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Nilai IKM Bakesbangpol (Nilai)	81,81	85		85,5		86		86,5		87			
	Nilai SAKIP Bakesbangpol (Nilai)	A	A		A		A		A		A			
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.764.549		57.919.140		59.389.127		61.003.916		63.104.890		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Bakesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	56.764.549	1	57.919.140	1	59.389.127	1	61.003.916	1	63.104.890		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	17	17		17		17		17		17			

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.350.586		1.378.057		1.413.032		1.451.452		1.501.440		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.350.586	7	1.378.057	7	1.413.032	7	1.451.452	7	1.501.440		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.020.340		1.046.236		1.074.683		1.111.695		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.020.340	1	1.046.236	1	1.074.683	1	1.111.695		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.020.340		1.046.236		1.074.683		1.111.695		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.020.340	1	1.046.236	1	1.074.683	1	1.111.695		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.004.310		1.024.738		1.050.746		1.079.315		1.116.487		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.004.310	1	1.024.738	1	1.050.746	1	1.079.315	1	1.116.487		
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.004.360		1.024.789		1.050.798		1.079.369		1.116.542		

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.004.360	1	1.024.789	1	1.050.798	1	1.079.369	1	1.116.542		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				495.293		505.367		518.193		532.283		550.615		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	495.293	17	505.367	17	518.193	17	532.283	17	550.615		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.910.000		51.945.509		53.263.886		54.712.131		56.596.416		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	50.910.000	3	51.945.509	3	53.263.886	3	54.712.131	3	56.596.416		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.933.408.724		2.993.074.257		3.069.038.483		3.152.485.637		3.261.057.244		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	2.933.408.724	1	2.993.074.257	1	3.069.038.483	1	3.152.485.637	1	3.261.057.244		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	18		18		18		18		18			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.931.410.000		2.991.034.879		3.066.947.345		3.150.337.643		3.258.835.271		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	18	2.931.410.000	18	2.991.034.879	18	3.066.947.345	18	3.150.337.643	18	3.258.835.271		
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	220.000	12	224.475	12	230.172	12	236.430	12	244.573		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				293.724		299.698		307.305		315.660		326.532		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	293.724	1	299.698	1	307.305	1	315.660	1	326.532		
8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				220.000		224.475		230.172		236.430		244.573		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	220.000	1	224.475	1	230.172	1	236.430	1	244.573		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				880.000		897.899		920.688		945.721		978.292		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	880.000	12	897.899	12	920.688	12	945.721	12	978.292		
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				165.000		168.356		172.629		177.323		183.430		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	165.000	1	168.356	1	172.629	1	177.323	1	183.430		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.235.000		4.321.139		4.430.811		4.551.283		4.708.029		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	4.235.000	1	4.321.139	1	4.430.811	1	4.551.283	1	4.708.029		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	495.000	1	505.068	1	517.887	1	531.968	1	550.289		
8.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	495.000	1	505.068	1	517.887	1	531.968	1	550.289		

8.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				440.000		448.950		460.344		472.861		489.146		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	440.000	1	448.950	1	460.344	1	472.861	1	489.146		
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.815.000		1.851.917		1.898.919		1.950.550		2.017.727		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1.815.000	12	1.851.917	12	1.898.919	12	1.950.550	12	2.017.727		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	495.000	1	505.068	1	517.887	1	531.968	1	550.289		
8.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				495.000		505.068		517.887		531.968		550.289		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	495.000	1	505.068	1	517.887	1	531.968	1	550.289		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.200.000		2.244.748		2.301.720		2.364.303		2.445.731		
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	2.200.000	2	2.244.748	2	2.301.720	2	2.364.303	2	2.445.731		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				770.000		785.662		805.602		827.506		856.006		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	770.000	1	785.662	1	805.602	1	827.506	1	856.006		

8.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				770.000		785.662		805.602		827.506		856.006		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	770.000	1	785.662	1	805.602	1	827.506	1	856.006		
8.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				660.000		673.424		690.516		709.291		733.719		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	660.000	2	673.424	2	690.516	2	709.291	2	733.719		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.399.801		292.225.174		299.641.846		307.789.110		318.389.366		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	286.399.801	2	292.225.174	2	299.641.846	2	307.789.110	2	318.389.366		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	30		30		30		30		30			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.025.700		4.107.583		4.211.833		4.326.353		4.475.353		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	16	4.025.700	16	4.107.583	16	4.211.833	16	4.326.353	16	4.475.353		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.334.800		37.073.850		38.014.784		39.048.406		40.393.233		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	30	36.334.800	30	37.073.850	30	38.014.784	30	39.048.406	30	40.393.233		

8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.752.951		35.459.826		36.359.796		37.348.419		38.634.699		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	34.752.951	2	35.459.826	2	36.359.796	2	37.348.419	2	38.634.699		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.776.350		18.137.921		18.598.261		19.103.948		19.761.888		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	17.776.350	2	18.137.921	2	18.598.261	2	19.103.948	2	19.761.888		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.890.000		1.928.443		1.977.386		2.031.152		2.101.104		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	1.890.000	2	1.928.443	2	1.977.386	2	2.031.152	2	2.101.104		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				191.620.000		195.517.551		200.479.786		205.930.832		213.023.089		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	191.620.000	4	195.517.551	4	200.479.786	4	205.930.832	4	213.023.089		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				61.000.000		62.240.740		63.820.410		65.555.687		67.813.425		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	61.000.000	10	62.240.740	10	63.820.410	10	65.555.687	10	67.813.425		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	53	15		10		10		10		10			
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				12.000.000		12.244.080		12.554.835		12.896.201		13.340.346		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	53	15	12.000.000	10	12.244.080	10	12.554.835	10	12.896.201	10	13.340.346		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.000.000		49.996.660		51.265.575		52.659.486		54.473.079		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	49.000.000	10	49.996.660	10	51.265.575	10	52.659.486	10	54.473.079		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				650.478.000		663.708.722		680.553.650		699.057.904		723.133.458		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	650.478.000	1	663.708.722	1	680.553.650	1	699.057.904	1	723.133.458		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	1		1		1		1		1			

	Menyurat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.295.765		2.354.032		2.418.038		2.501.315		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.250.000	1	2.295.765	1	2.354.032	1	2.418.038	1	2.501.315		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.360.000		101.380.982		103.954.032		106.780.542		110.458.064		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	99.360.000	1	101.380.982	1	103.954.032	1	106.780.542	1	110.458.064		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				548.868.000		560.031.975		574.245.586		589.859.324		610.174.079		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	548.868.000	4	560.031.975	4	574.245.586	4	589.859.324	4	610.174.079		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.087.639		260.273.306		266.887.110		274.124.411		283.544.245		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	255.087.639	1	260.273.306	1	266.887.110	1	274.124.411	1	283.544.245		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	50		50		50		50		50			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				26.740.000		27.283.892		27.976.357		28.737.034		29.726.737		

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	26.740.000	1	27.283.892	1	27.976.357	1	28.737.034	1	29.726.737		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.606.000		86.326.886		88.517.862		90.924.663		94.056.108		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	84.606.000	10	86.326.886	10	88.517.862	10	90.924.663	10	94.056.108		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.100.000		4.183.394		4.289.569		4.406.202		4.557.955		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	15	4.100.000	15	4.183.394	15	4.289.569	15	4.406.202	15	4.557.955		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.565.000		33.227.372		34.070.683		34.997.065		36.202.364		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	50	32.565.000	50	33.227.372	50	34.070.683	50	34.997.065	50	36.202.364		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				107.076.639		109.251.762		112.032.639		115.059.447		119.001.081		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	107.076.639	1	109.251.762	1	112.032.639	1	115.059.447	1	119.001.081		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.677.834.394		2.732.299.771		2.801.650.623		2.877.815.302		2.976.914.022		
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (%)	83,62	85,05	2.677.834.394	85,98	2.732.299.771	86,92	2.801.650.623	88,08	2.877.815.302	89,02	2.976.914.022	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila				2.677.834.394		2.732.299.771		2.801.650.623		2.877.815.302		2.976.914.022		

dan Karakter Kebangsaan													
Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	2.677.834.394	1	2.732.299.771	1	2.801.650.623	1	2.877.815.302	1	2.976.914.022	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		17		17		17		17		17		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		401		400		400		400		400		
	Jumlah Paskibraka (Orang)		38		38		38		38		38		
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah				1.588.212		1.620.516		1.661.645		1.706.825		1.765.608	

Kebangsaan														
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.588.212	1	1.620.516	1	1.661.645	1	1.706.825	1	1.765.608		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.011.668.182		1.032.245.513		1.058.443.904		1.087.222.994		1.124.666.954		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		401	1.011.668.182	400	1.032.245.513	400	1.058.443.904	400	1.087.222.994	400	1.124.666.954		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				21.750.000		22.192.395		22.755.638		23.374.364		24.179.377		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		17	21.750.000	17	22.192.395	17	22.755.638	17	23.374.364	17	24.179.377		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,				118.280.000		120.685.815		123.748.821		127.113.552		131.491.342		

Berbangsa, dan Bernegara														
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500	1.200	118.280.000	1.200	120.685.815	1.200	123.748.821	1.200	127.113.552	1.200	131.491.342		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.340.823.000		1.368.095.339		1.402.817.599		1.440.960.210		1.490.586.879		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)		38	1.340.823.000	38	1.368.095.339	38	1.402.817.599	38	1.440.960.210	38	1.490.586.879		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				171.065.000		174.544.462		178.974.400		183.840.714		190.172.188		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	2	2	171.065.000	2	174.544.462	2	178.974.400	2	183.840.714	2	190.172.188		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				12.660.000		12.915.731		13.248.616		13.596.643		14.051.674		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1	12.660.000	1	12.915.731	1	13.248.616	1	13.596.643	1	14.051.674		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				7.700.245.330		7.856.863.217		8.056.285.023		8.275.300.327		8.560.263.602		
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik (%)	74,34	82,01	7.700.245.330	85,84	7.856.863.217	89,68	8.056.285.023	93,51	8.275.300.327	94,99	8.560.263.602	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				7.700.245.330		7.856.863.217		8.056.285.023		8.275.300.327		8.560.263.602		
Jumlah peserta dalam pendidikan pendidikan politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		110	7.700.245.330	110	7.856.863.217	110	8.056.285.023	110	8.275.300.327	110	8.560.263.602		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		705		700		710		720		720			
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.702.500		1.737.129		1.781.217		1.829.648		1.892.661		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.702.500	1	1.737.129	1	1.781.217	1	1.829.648	1	1.892.661		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				195.445.000		199.420.351		204.481.640		210.041.495		217.275.325		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		705	195.445.000	700	199.420.351	710	204.481.640	720	210.041.495	720	217.275.325		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				7.363.929.230		7.513.711.551		7.704.409.550		7.913.892.445		8.186.446.901		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		110	7.363.929.230	110	7.513.711.551	110	7.704.409.550	110	7.913.892.445	110	8.186.446.901		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				139.168.600		141.994.186		145.612.616		149.536.739		154.648.715		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	139.168.600	1	141.994.186	1	145.612.616	1	149.536.739	1	154.648.715		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				559.778.800		571.164.330		585.661.543		601.583.130		622.298.885		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta (%)	71,05	73,03	559.778.800	74,34	571.164.330	75	585.661.543	76,32	601.583.130	76,97	622.298.885	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				559.778.800		571.164.330		585.661.543		601.583.130		622.298.885		
Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	559.778.800	1	571.164.330		585.661.543	1	601.583.130	1	622.298.885		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	150			150		150		150		150			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	100		100		100		100		100			

	(Laporan)												
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				761.250		776.734		796.447		818.102		846.278	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	761.250	1	776.734		796.447	1	818.102	1	846.278	
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				761.250		776.734		796.447		818.102		846.278	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	761.250	1	776.734	1	796.447	1	818.102	1	846.278	
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				371.410.800		378.965.296		388.583.435		399.149.018		412.895.711	

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	150		371.410.800	150	378.965.296	150	388.583.435	150	399.149.018	150	412.895.711		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				186.845.500		190.645.566		195.485.214		200.797.908		207.710.618		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	100	100	186.845.500	100	190.645.566	100	195.485.214	100	200.797.908	100	207.710.618		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				855.737.212		873.142.340		895.304.317		919.643.742		951.312.042		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah (Persentase)	57,78	71,11	855.737.212	75,56	873.142.340	80	895.304.317	84,44	919.643.742	88,89	951.312.042	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				855.737.212		873.142.340		895.304.317		919.643.742		951.312.042		
Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	150	150	855.737.212	150	873.142.340	150	895.304.317	150	919.643.742	150	951.312.042		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	140	140		140		140		140		140		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.312.712		1.339.412		1.373.406		1.410.749		1.459.336	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.312.712	1	1.339.412	1	1.373.406	1	1.410.749	1	1.459.336	
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				755.863.500		771.237.763		790.811.778		812.313.950		840.290.042	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	150	150	755.863.500	150	771.237.763	150	790.811.778	150	812.313.950	150	840.290.042	

8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				98.561.000		100.565.165		103.119.133		105.919.043		109.562.664		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	140	140	98.561.000	140	100.565.165	140	103.119.133	140	105.919.043	140	109.562.664		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.566.093.220		1.597.946.518		1.638.505.374		1.683.049.199		1.741.005.671		
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah (%)	94,17	86,4	1.566.093.220	87,2	1.597.946.518	87,69	1.638.505.374	89,23	1.683.049.199	90	1.741.005.671	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.566.093.220		1.597.946.518		1.638.505.374		1.683.049.199		1.741.005.671		
Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.566.093.220	1	1.597.946.518	1	1.638.505.374	1	1.683.049.199	1	1.741.005.671		

	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	200		200		200		200		200			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				990.000		1.010.136		1.035.773		1.063.936		1.100.578		

Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	990.000	1	1.010.136	1	1.035.773	1	1.063.936	1	1.100.578		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.091.722.100		1.113.927.727		1.142.199.213		1.173.255.609		1.213.662.533		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50	50	1.091.722.100	50	1.113.927.727	50	1.142.199.213	50	1.173.255.609	50	1.213.662.533		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				11.220.000		11.448.214		11.738.770		12.057.947		12.473.223		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	200	11.220.000	200	11.448.214	200	11.738.770	200	12.057.947	200	12.473.223		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				396.161.120		404.219.037		414.478.116		425.747.776		440.410.529		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1	1	396.161.120	1	404.219.037	1	414.478.116	1	425.747.776	1	440.410.529		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				66.000.000		67.341.404		69.053.502		70.923.931		73.358.808		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	66.000.000	1	67.341.404	1	69.053.502	1	70.923.931	1	73.358.808		

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas Pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	

	SERTA BUDAYA POLITIK		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2.	Jumlah potensi konflik sosialyang terjadi	Nilai	209	205	200	195	190	185	180	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	
4.	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	86,6	86,83	87	87,18	87,37	87,57	88,33	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Di samping Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2025–2029, terdapat pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator pada level Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat. Namun demikian, hingga saat ini Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam dokumen RPJMD, sehingga tidak menetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan melalui IKK tersebut.

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai penutup, Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesbangpol beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal penting yang menjadi penekanan dalam Rencana Strategis ini sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta selama periode 2025–2029. Adapun poin-poin utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Renstra ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kinerja pelayanan, sumber daya, serta isu-isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, sehingga perencanaan yang dirancang lebih responsif dan relevan.
2. Telah dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
3. Renstra ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pelaksanaan Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta evaluasi kinerja, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

.

Apabila di kemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)